



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 81);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

## BAB II

### RENSTRA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada RPJMD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:
  - a. analisis gambaran pelayanan;
  - b. analisis permasalahan;
  - c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
  - d. analisis isu strategis;
  - e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD;
  - f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah;dan

- g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi, arah kebijakan, program Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

### BAB III

#### SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
  - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
  - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
  - e. BAB V : Penutup.
- (2) Uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB IV

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 5

- (1) Kepala Bappeda Litbang melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan kebijakan Renstra Perangkat Daerah mulai dari tahap penyusunan awal sampai dengan rancangan akhir.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota melalui Kepala Bappeda Litbang.

**BAB V**  
**PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

**Pasal 6**

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
  - a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang RPJMD;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun kecuali terdapat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 29 September 2025  
WALI KOTA BALIKPAPAN,  
Ttd.  
RAHMAD MAS'UD



Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal 29 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

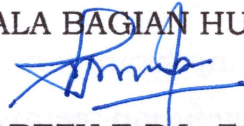
Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

A. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan mengemban mandat krusial dalam membentuk masa depan kota melalui pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan pelestarian identitas budaya yang kaya. Sebagai lembaga pemerintah daerah, dinas ini bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan merata di seluruh jenjang, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga pendidikan kesetaraan. Selain itu, dinas ini juga memiliki tugas vital dalam memajukan, melestarikan, dan memanfaatkan warisan budaya, tradisi, dan kesenian lokal.

Kota Balikpapan, yang dikenal sebagai kota transit dengan populasi yang sangat heterogen, menghadapi tantangan unik dalam menjalankan mandat ini. Kedatangan berbagai etnis dan budaya dari seluruh Indonesia, ditambah dengan pengaruh globalisasi, berpotensi mengikis nilai-nilai dan praktik budaya lokal asli. Selain itu, dampak dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah sekitar diperkirakan akan semakin meningkatkan urbanisasi dan keragaman populasi, yang, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan potensi gesekan antarbudaya. Konteks dinamis ini menuntut pendekatan strategis yang adaptif dan komprehensif dalam perencanaan pendidikan dan kebudayaan, memastikan bahwa pertumbuhan kota diimbangi dengan pengembangan kapasitas manusia dan penguatan identitas budaya.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun dokumen perencanaan lima tahunnya yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.

Penyusunan Renstra PD sebagai acuan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi, sinergi dan keberlanjutan perencanaan jangka Menengah Daerah

2025-2029. Dokumen rencana strategis (renstra) Disdikbud 2025-2029 dirancang sebagai dokumen perencanaan yang mampu memberikan arahan atau panduan untuk memudahkan mencapai tujuan yang hendak dicapai secara terukur, baik tujuan kota sebagai ultimate outcome, maupun tujuan perangkat daerah (PD). Keterkaitan antara perencanaan di PD dengan perencanaan Pemerintah Kota, Provinsi, dan Pusat (K/L) akan mempermudah pengembangan pembiayaan bersama untuk program-program yang akan dilakukan.

Renstra ini disusun melalui pendekatan partisipatif, teknokratis, politis, serta berbasis bukti (*evidence-based planning*), dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan - mulai dari satuan pendidikan, pelaku budaya, dunia usaha, dan masyarakat. Proses penyusunan juga memperhatikan hasil evaluasi kinerja Renstra 2021–2026 serta perkembangan isu strategis seperti pemerataan mutu dan akses pendidikan, penguatan literasi-numerasi, revitalisasi kebudayaan daerah, serta peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan di era digital.

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renstra yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renstra
  - a. Penyusunan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  - b. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
  - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
  - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Pengolahan Data dan Informasi

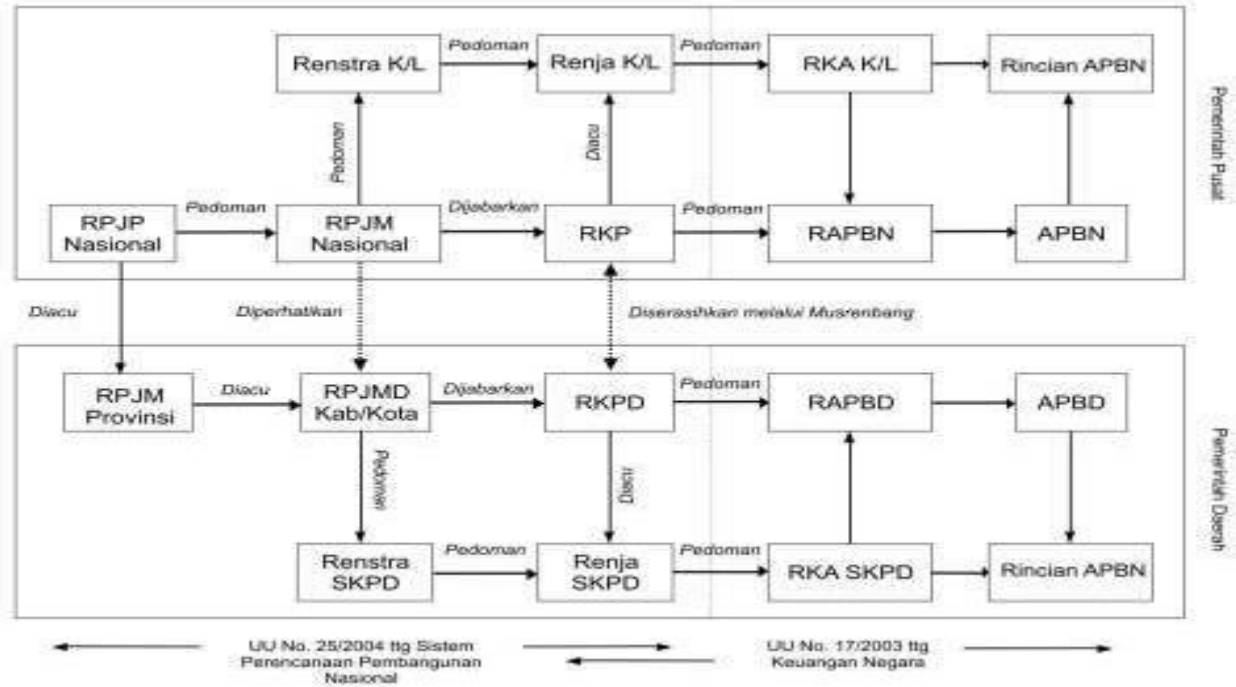
Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis, resume/notulen-notulen rapat, bahan paparan, hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renstra.
3. Tahap Perumusan Rancangan Renstra
4. Penyajian dan penyampaian rancangan Renstra
5. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
6. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renstra yang mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD
7. Penetapan Renstra menjadi produk hukum



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Akhir Renstra

**Keterkaitan Antara Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya**

Perencanaan Daerah disusun berdasarkan data serta aturan yang mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, aspek kesejahteraan, pelayanan serta data dan informasi yang dimuat dalam dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Selain berpedoman pada Permendagri No. 86 Tahun 2017, secara substansi Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengacu kepada kebijakan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, perencanaan K/L terkait, prioritas nasional dan daerah, serta dokumen perencanaan lainnya yang relevan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (baik jangka panjang, menengah dan tahunan) sehingga akan menjadi dokumen perencanaan publik yang akuntabel, realible dan implementatif, gambaran keterkaitan dokumen seperti gambar 1.2 di bawah:





Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Penganggaran

Dokumen renstra ini merupakan pedoman arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan untuk lima tahun ke depan, yang menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025–2029.

## 1.2 Landasan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 31 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan bahwa pemerintah mengusahakan serta menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, Pasal 32 menyebut bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, serta Pasal 28C ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Berlandaskan landasan hukum utama tersebut, penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025-2029 Kota Balikpapan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
14. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan;
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 26A/M.PPN/HK/05/2025 tentang Kode Referensi Indikator Pembangunan;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2045.
29. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029;

30. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
31. Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-279/2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

- Renstra ini disusun sebagai kerangka kerja yang komprehensif dan terarah bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan untuk periode 2025 hingga 2029.
- Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Disdikbud Kota Balikpapan dalam rangka menunjang terwujudnya visi, tujuan dan sasaran Daerah/kota dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.
- Sebagai Indikator Kinerja Kunci atau Indikator Kinerja Utama keberhasilan bagi Disdikbud Kota Balikpapan dalam melaksanakan fungsinya.

#### 1.3.2 Tujuan

- Dokumen ini bertujuan untuk memandu seluruh operasional, alokasi sumber daya, dan pengukuran kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan
- Sebagai pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Disdikbud Kota Balikpapan selama periode 5 tahun.
- Sebagai tolok ukur menentukan tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja Disdikbud Kota Balikpapan atas target yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup Renstra ini mencakup seluruh aspek yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Di bidang pendidikan, fokusnya meliputi peningkatan akses dan kualitas layanan di jenjang PAUD, SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan. Ini termasuk pengembangan infrastruktur, peningkatan kompetensi pendidik, penyediaan sarana prasarana pembelajaran, serta penguatan tata kelola pendidikan. Di bidang kebudayaan, ruang lingkupnya antara lain mencakup perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah lokal, serta pengelolaan cagar budaya. Dokumen ini juga menguraikan program-program penunjang yang esensial untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas kinerja internal perangkat daerah.

### 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat informasi terkait latar belakang penyusunan Renstra, dasar hukum yang relevan dan signifikan, Keterkaitan Antara Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra, dan sistematika penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah; sumber daya perangkat daerah; kinerja penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah; kelompok sasaran pelayanan perangkat daerah.

Memuat data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah disertai dengan hasil

evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020-2024 dan data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.

Memuat hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah selama 5 (lima) tahun terakhir yang berkaitan dengan capaian IKU dan IKK.

Memuat permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah, serta memuat isu strategis sesuai lingkungan dinamis yang dapat mempengaruhi perangkat daerah baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada NSPK (norma, standar, prosedur dan kriteria) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029.

Pada bagian ini menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, Selain itu, bab ini memuat penahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Dalam Bab III dikemukakan juga hubungan sebab-akibat atau keterkaitan antara kondisi tujuan dan sasaran kota (yang ingin dicapai) dengan tujuan perangkat daerah.

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, *outcome* dan *output* yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemuatannya.

Memuat penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU berlaku dari tahun 2025 hingga 2030.

Memuat penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK berlaku dari tahun 2025 hingga 2030.

**BAB V PENUTUP**



**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN**

**2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan**

Gambaran pelayanan perangkat daerah merupakan deskripsi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat maupun antar lembaga pemerintahan.

**2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Hingga akhir penyusunan Renstra, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terbaru seluruh perangkat daerah masih dalam proses pembahasan sehingga pemutakhiran SOTK DISDIKBUD terbaru menunggu arahan lebih lanjut / pengesahan SOTK. Mengacu pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

**A. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai standar nasional pendidikan;
- b. penyusunan perencanaan pembiayaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pembelajaran, sarana, prasarana, utilitas sekolah;
- c. penyusunan perencanaan pembiayaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal/kesetaraan, pendidikan sekolah dasar, dan pendidikan sekolah menengah pertama;
- d. penyusunan perencanaan pembiayaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengendalian perizinan, kurikulum, bahasa dan sastra;
- e. penyusunan perencanaan pembiayaan dan pelaksanaan penyelenggaraan kebudayaan;
- f. penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, evaluasi pembelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal/kesetaraan, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, bahasa dan sastra serta kebudayaan;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana prasarana, dan utilitas pendidikan dan kebudayaan;
- h. penyelenggaraan pemantauan, pengendalian dan analisa kelayakan sarana prasarana, dan utilitas sekolah serta mutu pendidikan;
- i. pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal/kesetaraan, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, bahasa dan sastra serta kebudayaan;
- j. pelaksanaan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan;

- k. penyelenggaraan layanan perizinan/rekomendasi/surat keterangan di bidang pendidikan dan di bidang kebudayaan;
- l. penyelenggaraan pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra;
- m. pembinaan dan pengendalian UPTD; dan
- n. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya

#### B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian:

- a. perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
- b. administrasi keuangan;
- c. administrasi barang milik Daerah pada Dinas;
- d. administrasi kepegawaian;
- e. administrasi umum;
- f. pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah;
- g. pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah;
- h. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah;
- i. layanan informasi dan pengaduan; dan j. pembinaan pelayanan publik.

Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran Dinas;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. pembinaan dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik;
- k. pengelolaan survei kepuasan masyarakat;
- l. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- m. pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksana;
- n. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
- o. pengoordinasian bidang dan UPTD;
- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### C. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas mengatur, mengelola, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- b. penyusunan petunjuk teknis pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal/kesetaraan;

- c. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal/kesetaraan;
  - d. pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal/kesetaraan;
  - e. penyiapan bahan kebijakan di bidang peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kelembagaan dan manajemen sekolah, sarana, prasarana dan utilitas sekolah, pengelolaan dana bagi pendidikan anak usia dini dan sekolah nonformal/kesetaraan;
  - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal / kesetaraan;
  - g. pembinaan lembaga pendidikan nonformal/kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang mencakup aspek kelembagaan, pendidik dan tenaga kependidikan;
  - h. pelaksanaan evaluasi perencanaan kebutuhan tenaga teknis dan memberikan pelatihan dan pembinaan dalam rangka peningkatan mutu/kualitas pelaksana program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal/kesetaraan;
  - i. pengoordinasian penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan yang meliputi program paket A setara sekolah dasar, program paket B setara sekolah menengah pertama dan program paket C setara sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan;
  - j. penyelenggaraan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal/kesetaraan;
  - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  - l. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- D. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
- Bidang Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas mengatur, mengelola, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan bidang pendidikan sekolah dasar. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar melaksanakan fungsi:
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar;
  - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
  - c. pelaksanaan program dan kegiatan lingkup pengelolaan pendidikan dasar, sarana, prasarana, utilitas sekolah, penyelenggaraan proses belajar dan ujian, serta pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa pendidikan sekolah dasar;
  - d. pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan sarana prasarana, kelembagaan dan manajemen, kurikulum nasional dan sistem pengujian serta prestasi peserta didik;
  - e. pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan standar nasional pendidikan sekolah dasar;
  - f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan implementasi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses dan standar penilaian pendidikan sekolah dasar;
  - g. pengawasan pendayagunaan sarana, prasarana, dan utilitas sekolah tingkat pendidikan sekolah dasar;
  - h. penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik pada pendidikan sekolah dasar;
  - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan

- pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

E. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas mengatur, mengelola, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan bidang pendidikan sekolah menengah pertama. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan lingkup pengelolaan pendidikan dasar, sarana, prasarana, utilitas sekolah, penyelenggaraan proses belajar dan ujian, serta pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa pendidikan sekolah menengah pertama;
- d. pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan sarana prasarana, kelembagaan dan manajemen, kurikulum nasional dan sistem pengujian serta prestasi peserta didik;
- e. pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan standar nasional pendidikan sekolah menengah pertama;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan implementasi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses dan standar penilaian pendidikan sekolah menengah pertama;
- g. pengawasan pendayagunaan sarana, prasarana, dan utilitas sekolah tingkat pendidikan sekolah menengah pertama;
- h. penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik pada pendidikan sekolah menengah pertama;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Bidang Guru dan Tenaga Pendidikan

Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang guru dan tenaga kependidikan. Bidang Guru dan Tenaga Pendidikan melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Guru dan Tenaga Pendidikan;
- b. penyelenggaraan pengelolaan pendataan, perhitungan, pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan lomba guru, pengawas dan kepala sekolah berprestasi;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. penyiapan bahan mutasi pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi tenaga pendidik;
- g. pengoordinasian dan kerja sama dengan instansi teknis dalam pelaksanaan pelatihan, pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan;



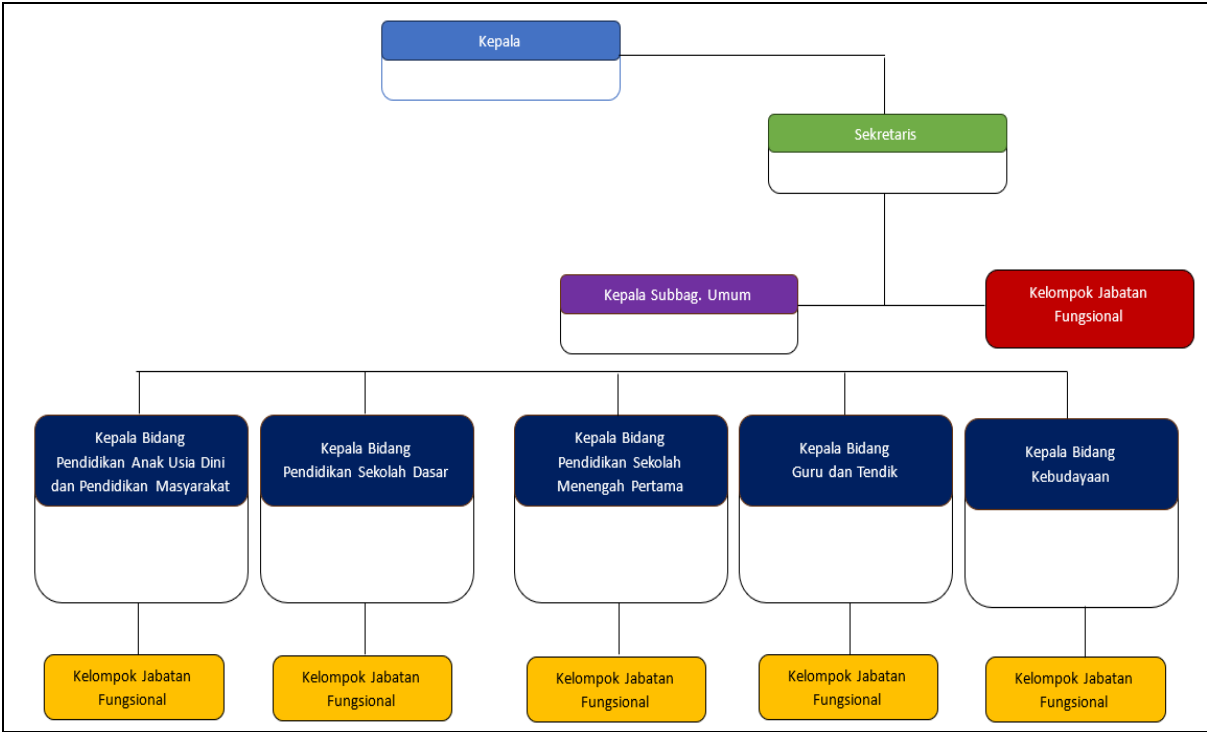
- h. penyelenggaraan pengelolaan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan penilaian kinerja pendidik secara efektif, efisien, objektif, adil, akuntabel;
  - i. pelaksanaan fasilitasi sertifikasi dan penetapan angka kredit;
  - j. penyusunan perhitungan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan per mata pelajaran, per jenjang, dan per satuan guru sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria;
  - k. penyelenggaraan penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan;
  - l. pengembangan dan pengelolaan database pendidik dan tenaga kependidikan;
  - m. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penegakan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan;
  - n. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan;
  - o. pengoordinasian, pemantauan, serta pengendalian perizinan pendidikan;
  - p. pelaksanaan pengendalian perizinan pendidikan;
  - q. fasilitasi proses akreditasi, pendirian/perizinan, penutupan sekolah;
  - r. penyusunan, pengembangan, dan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
  - s. penyusunan silabus dan buku teks pelajaran pelaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan sekolah menengah pertama;
  - t. penyusunan dan pelaksanaan pengembangan kurikulum alternatif dan pengajarannya;
  - u. pelaksanaan program pengembangan bahasa dan sastra Daerah;
  - v. pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, serta pengembangan, perlindungan bahasa dan sastra Daerah;
  - w. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  - x. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- G. Bidang Kebudayaan dan Olah Raga
- Bidang Kebudayaan dan Olah Raga mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Kebudayaan dan Olah Raga. Bidang Kebudayaan dan Olah Raga melaksanakan fungsi:
- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Kebudayaan dan Olah Raga;
  - b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian;
  - c. pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerja sama luar negeri skala Daerah;
  - d. penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba seni budaya;
  - e. penyelenggaraan pembinaan kesenian dan pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian serta apresiasi seni tradisional dan non tradisional;
  - f. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, serta pembinaan kesenian dan olahraga tradisional di sekolah;
  - g. penyusunan bahan pelestarian di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi,

- pembinaan komunitas dan lembaga adat, serta pembinaan kesenian dan olahraga tradisional di sekolah;
- h. penyusunan bahan pembinaan pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi, komunitas dan lembaga adat, kesenian dan olahraga tradisional di sekolah dan pembinaan sejarah lokal;
  - i. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat Daerah;
  - j. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam provinsi;
  - k. penyusunan bahan pengelolaan museum;
  - l. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian dan olahraga tradisional di sekolah;
  - m. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian dan olahraga tradisional di sekolah;
  - n. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan kesenian dan olahraga tradisional di sekolah;
  - o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  - p. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan yaitu, sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang membawahi:
  - 1. Subbagian Umum; dan
  - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Bidang Kebudayaan dan Olah Raga, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. UPTD;

#### SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

2.1.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Pelaksanaan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi organisasi, baik berupa sumber daya manusia, aset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Adanya permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1. Sumber Daya Manusia

Dalam usaha pencapaian kinerja berdasarkan tugas dan fungsi OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki pendidikan dan kompetensi memadai. Hal ini terdeskripsi sebagai berikut.

Tabel 2.1 Data Pegawai ASN berdasarkan tingkat pendidikan Per 1 September 2025

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1.	SD	2	1,79
2.	SLTA/se-derajat	32	28,57
3.	Sarjana Muda/D3	6	5,36
4.	D4/Sarjana (S1)	59	52,68
5.	Pasca Sarjana (S2)	12	10,71
6.	Doktor (S3)	1	0,89
Jumlah		112	100,00

Tabel 2.2 Data Pegawai NON ASN Tenaga Bantu Administrasi dan Reparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 1 September 2025

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	SLTA	6	100,00
Jumlah		6	100,00

Tabel 2.3 Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah	%
1	II	18	16,07
2	III	33	29,46
3	IV	32	28,57
4	PPPK	23	20,54
5	Tenaga bantu	6	5,36
Jumlah		112	100,00

2. Sarana dan Prasarana

Prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pendukung tugas fungsi organisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah aset yang tidak dipakai (Rp)

Nama Barang	Nilai	
ASET TETAP		
Tanah	Rp	14.398.101.000,00
Peralatan dan Mesin	Rp	342.485.226.349,47
Alat besar	Rp	14.165.000,00
Komputer	Rp	157.437.617.740,47
Alat Keselamatan Kerja	Rp	535.829.000,00
Peralatan proses/produksi	Rp	1.800.000,00
Peralatan Olahraga	Rp	171.547.075,00
Alat Angkutan	Rp	2.848.189.000,00
Alat bengkel dan alat ukur	Rp	45.268.600,00
Alat Pertanian	Rp	2.147.884.000,00
Alat kantor dan rumah tangga	Rp	157.642.389.853,98
Alat studio, komunikasi dan pemancar	Rp	3.442.943.050,00
Alat kedokteran dan kesehatan	Rp	213.451.000,00
Alat Laboratorium	Rp	17.868.437.730,02
Alat Persenjataan	Rp	115.704.300,00
Gedung dan Bangunan	Rp	369.839.766.019,85
Bangunan Gedung		369.839.766.019,85
Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	8.930.228.627,59
Jalan dan Jembatan		8.930.228.627,59
Aset Tetap Lainnya	Rp	516.426.871,00
Bahan Perpustakaan	Rp	438.961.871,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	Rp	77.465.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	80.017.902.153,70
Kontruksi Dalam Pengerjaan	Rp	80.017.902.153,70
ASET LAINNYA		
Peralatan dan Mesin	Rp	6.190.339.821,01
Alat Besar	Rp	58.916.000,00

Nama Barang	Nilai
Komputer	Rp 176.280.500,00
Alat Angkutan	Rp 69.439.000,00
Alat Pertanian	Rp 30.000.000,00
Alat kantor dan rumah tangga	Rp 871.972.235,01
Alat Laboratorium	Rp 623.861.366,00
Aset Tidak Berwujud	Rp 4.359.870.720,00

Sumber: Disdikbud Kota Balikpapan, September 2025

**2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan pada Peraturan yang berlaku, maka arah kebijakan dituangkan dalam Penetapan Kinerja Sekretariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

Adapun capaian kinerja, anggaran, dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6.

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Indeks Warisan Budaya					0,496	0,4962	0,4964			0,464	0,496	0,496			93,55%	99,86%	99,84%
2	Indeks Pendidikan					0,755	0,762	0,769			0,759	0,76	0,762			100,57%	99,72%	99,12%
3	Nilai pemajuan kebudayaan					0,25	0,43	0,75			0,24	N/A	0,93			96,00%	N/A	124,00%
4	Harapan Lama Sekolah (HLS)					14,16	14,17	14,18			14,23	14,24	14,25			100,49%	100,49%	100,49%
5	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)					10,7	10,71	10,72			10,92	10,93	10,99			102,06%	102,05%	102,52%
6	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah*)					27	28	29,50			27	N/A	N/A			100,00%	N/A	N/A
7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah					78,03	80,03	82,03			63,63	69,36	64,39			81,55%	86,67%	78,50%

- Catatan:
- Target indikator yang tercantum dalam dokumen Renstra 2021-2026 dimulai sejak tahun 2022 s.d. 2026 sehingga data target tahun 2020 dan 2021 tidak tersedia dalam Renstra
  - \*) Indikator Nilai Reformasi Birokrasi tidak dilakukan perhitungan lagi untuk seluruh perangkat daerah.

Adapun realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rp-	Rp 693.747.367.868,00	Rp 868.946.157.669,00	Rp 923.935.925.538,00	Rp 1.042.485.727.444,00	Rp-	Rp 627.011.337.314,68	Rp 721.796.990.531,62	Rp797.831.392.257,00	Rp 908.557.873.359,00		90,38%	83,07%	86,35%	87,15%	14,80%	13,18%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Rp 314.643.175.698,00	Rp 355.735.233.473,00	Rp 413.774.613.773,00	Rp 487.441.291.891,00		Rp 284.228.962.586,30	Rp 300.616.709.500,00	Rp 327.831.869.498,00	Rp 396.935.323.492,00		90,33%	84,51%	79,23%	81,43%	15,73%	11,97%
2	Program Pengelolaan Pendidikan		Rp 373.696.040.020,00	Rp 506.512.424.196,00	Rp 503.883.561.265,00	Rp 545.972.626.153,00		Rp 338.510.794.836,48	Rp 415.879.730.367,83	Rp 464.009.291.499,00	Rp 502.973.581.307,00		90,58%	82,11%	92,09%	92,12%	14,46%	14,28%
3	Program Pengembangan Kurikulum		Rp 728.949.100,00	Rp 423.500.000,00	Rp -	Rp 200.000.000,00		Rp 526.831.629,00	Rp 128.224.213,00	Rp -	Rp 175.917.222,00		72,27%	30,28%	0,00%	87,96%	-70,95%	-87,83%
4	Program Pendidik dan Tenaga		Rp 1.907.383.050,00	Rp 1.300.000.000,00	Rp 3.322.750.500,00	Rp 2.399.819.400,00		Rp 1.384.492.805,00	Rp 1.036.413.997,00	Rp 3.129.650.942,00	Rp 2.166.190.100,00		72,59%	79,72%	94,19%	90,26%	31,99%	48,68%
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan		Rp -	Rp 200.000.000,00	Rp -	Rp -		Rp -	Rp 45.831.215,00	Rp -	Rp -			22,92%				
6	Program Pengembangan Kebudayaan		Rp -	Rp 1.130.000.000,00	Rp 1.600.000.000,00	Rp 2.304.100.000,00		Rp -	Rp 631.788.941,00	Rp 1.570.084.640,00	Rp 2.241.289.457,00			55,91%	98,13%	97,27%	42,80%	95,63%
7	Program Pengembangan Kesenian		Rp 1.398.970.000,00	Rp 2.250.000.000,00	Rp 305.000.000,00	Rp 2.962.890.000,00		Rp 1.303.657.032,00	Rp 2.212.257.271,00	Rp 286.502.488,00	Rp 2.951.417.876,00		93,19%	98,32%	93,94%	99,61%	281,94%	304,27%
8	Program Pembinaan Sejarah		Rp -	Rp 175.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Rp 60.000.000,00		Rp -	Rp 145.033.900,00	Rp 59.532.000,00	Rp 57.500.000,00			82,88%	99,22%	95,83%	-32,86%	-31,18%
9	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		Rp 1.372.850.000,00	Rp 1.220.000.000,00	Rp 990.000.000,00	Rp 1.145.000.000,00		Rp 1.056.598.425,90	Rp 1.101.001.126,79	Rp 944.461.190,00	Rp 1.056.653.905,00		76,96%	90,25%	95,40%	92,28%	-4,78%	0,62%

Berdasarkan data pada Tabel 2.6, dapat dilihat dalam perhitungan rata-rata pertumbuhan anggaran bahwa penyediaan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 cukup fluktuatif.

Nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2020 belum mengacu ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, data anggaran dan realisasi tahun 2020 disajikan terpisah sebagaimana tabel di bawah:



Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2020

KODE PROGRAM/KEGIATAN	URAIAN	MURNI (Rp.)	PERGESERAN (Rp.)	PERUBAHAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI				SISA ANGGARAN
						FISIK (%)	TTB (%)	KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	
1.01.01.1.0 1.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	Rp 584.002.568.490,00	Rp 542.780.732.429,00	Rp 546.055.606.104,53	100,000	94,55	94,550	Rp 506.002.162.841,49	92,66	Rp 40.053.443.263,04
1.01.01.1.0 1.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp 331.709.620.400,00	Rp 327.476.424.000,00	Rp 308.406.081.777,53	56,479	90,65	51,198	Rp 279.560.174.947,00	90,65	Rp 28.845.906.830,53
1.01.01.1.0 1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	Rp 252.292.948.090,00	Rp 215.304.308.429,00	Rp 237.649.524.327,00	43,521	99,62	43,356	Rp 226.441.987.894,49	95,28	Rp 10.684.134.557,51
1.01.01.1.0 1.01.15.	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Rp 7.430.943.000,00	Rp 7.048.611.500,00	Rp 7.047.611.500,00	1,291	99,76	1,288	Rp 6.180.128.813,00	87,69	Rp 867.482.687,00
1.01.01.1.0 1.01.18.	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Rp 17.702.791.000,00	Rp 17.378.501.000,00	Rp 17.515.320.200,00	3,208	98,45	3,158	Rp 16.181.258.774,00	92,38	Rp 1.334.061.426,00
1.01.01.1.0 1.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp 1.801.000.000,00	Rp 709.254.000,00	Rp 709.254.000,00	0,130	83,17	0,108	Rp 439.017.581,00	61,90	Rp 270.236.419,00
1.01.01.1.0 1.01.30.	PROGRAM PENDIDIKAN DASAR	Rp 214.120.035.450,00	Rp 184.294.825.539,00	Rp 206.271.041.347,00	37,775	99,85	37,718	Rp 198.655.287.936,60	96,31	Rp 7.092.351.535,40
1.01.01.1.0 1.01.31.	PROGRAM TATA KELOLA BIDANG PENDIDIKAN	Rp 1.960.000.000,00	Rp 500.775.000,00	Rp 500.775.000,00	0,092	100,00	0,092	Rp 417.867.500,00	83,44	Rp 82.907.500,00

KODE PROGRAM/ KEGIATAN	URAIAN	MURNI  (Rp.)	PERGESERAN  (Rp.)	PERUBAHAN  (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI				SISA ANGGARAN
						FISIK (%)	TTB (%)	KEUANGAN (Rp)	KEUANGA N (%)	
1.01.1.01.0 1.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp 2.732.200.640,00	Rp 2.485.450.640,00	Rp 2.567.707.530,00	0,470	99,92	0,470	Rp 2.130.390.730,00	82,97	Rp 437.316.800,00
1.01.1.01.0 1.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp 1.094.178.000,00	Rp 835.178.000,00	Rp 986.102.000,00	0,181	100,00	0,181	Rp 693.267.959,00	70,30	Rp 292.834.041,00
1.01.1.01.0 1.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Rp 102.400.000,00	Rp -	Rp -	0,000	0,00	0,000	Rp -	0,00	Rp -
1.01.06.1.0 1.01.22.	PROGRAM PENANGGULANG AN KEMISKINAN TERPADU	Rp 150.000.000,00	Rp 21.110.000,00	Rp 21.110.000,00	0,004	82,95	0,003	Rp 16.706.145,00	79,14	Rp 4.403.855,00
1.02.13.1.0 1.01.20.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKAT AN OLAHRAGA	Rp 18.150.000,00	Rp 9.075.000,00	Rp 9.075.000,00	0,002	100,00	0,002	Rp 9.075.000,00	100,00	Rp -
1.02.16.1.0 1.01.17.	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Rp 3.256.250.000,00	Rp 656.217.750,00	Rp 656.217.750,00	0,120	79,27	0,095	Rp 499.212.850,00	76,07	Rp 157.004.900,00
1.02.16.1.0 1.01.19.	PROGRAM PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA	Rp 1.925.000.000,00	Rp 1.365.310.000,00	Rp 1.365.310.000,00	0,250	97,59	0,244	Rp 1.219.774.605,89	89,34	Rp 145.535.394,11

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Permasalahan Pembangunan Lintas Sektor di Kota Balikpapan dari aspek transformasi sosial (Penguatan SDM yang berdaya saing masih belum optimal) salah satunya yaitu belum optimalnya layanan pendidikan yang berkualitas, baik dari sisi pemerataan aspek pendidikan maupun peningkatan kualitas pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan seperti kualitas sarana dan prasarana pendidikan, jumlah dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, tata kelola dan manajemen layanan pendidikan, serta percepatan partisipasi pendidikan dan pengembangan layanan pendidikan dasar (PAUD-SD-SMP-Kesetaraan).

Analisis mendalam terhadap kondisi eksisting di sektor pendidikan dan kebudayaan Kota Balikpapan mengidentifikasi sejumlah masalah pokok dengan akar masalah yang saling terkait. Pemahaman terhadap akar masalah ini sangat penting untuk merumuskan intervensi strategis yang tepat dan efektif. Permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan di setiap jenjang dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **2.2.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5-6 Tahun menjadi tantangan bagi Kota Balikpapan. Menurut Rapor Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2025, APS Kota Balikpapan berada pada angka 53,27% sehingga masih jauh untuk mencapai angka 100%. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor antara lain:

- a. Belum ada kebijakan yang mewajibkan anak usia 5-6 tahun untuk masuk ke PAUD;
- b. Rendahnya kesadaran orang tua untuk memasukkan anaknya ke PAUD;
- c. PAUD belum menjadi syarat masuk ke jenjang SD.

### **2.2.2 Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF)**

Tingginya Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) merupakan permasalahan/tantangan di Kota Balikpapan. Menurut Dashboard ATS, jumlah ATS Kota Balikpapan pada tahun 2025 berada pada angka 6407 anak. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain:

- a. Adanya siswa pendatang yang belum dilaporkan atau terdata pada dinas terkait;
- b. Kendala pada faktor ekonomi yang menyebabkan siswa harus bekerja, sehingga meninggalkan pelajaran dan terkadang pindah tanpa keterangan dan tidak bisa dihubungi;
- c. Siswa pindah sekolah tetapi tidak melanjutkan sekolah yang menyebabkan data siswa dianggap tidak aktif bersekolah dimanapun.

### **2.2.3 Pengembangan Pendidikan Sekolah Dasar**

1. Terdapat masalah terkait kualitas pengajaran, kurangnya pelatihan, sertifikasi yang lemah, dan kurangnya insentif bagi guru sehingga Pemerintah kota Balikpapan terus berupaya meningkatkan pelatihan guru, meningkatkan sistem sertifikasi, dan memberikan insentif yang menarik untuk menghasilkan guru berkualitas.
2. Beberapa sekolah masih kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang memadai, perpustakaan, dan laboratorium serta kurang maksimalnya rehabilitasi.

- 3. Kekurangan Tenaga Pendidik pada satuan Pendidikan menimbulkan ketimpangan beban kerja di antara pegawai yang tersisa. Rekrutmen PPPK telah dilakukan namun kebutuhan di lapangan terus meningkat.
- 4. Tenaga Pendidik disibukkan dengan kegiatan-kegiatan lain dan beban administrasi yang jauh lebih banyak. Disamping itu juga wajib mengisi Platform Merdeka Mengajar (PMM) secara daring para guru harus rajin ikut pendidikan dan pelatihan (diklat) serta seminar terkait pendidikan.

2.2.4 Pengembangan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- 1. Pertumbuhan penduduk sangat tinggi di beberapa kecamatan, seperti Balikpapan Utara dan Balikpapan Selatan, sementara untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) terkendala penyediaan lahan sekolah baru yang terbatas.
- 2. Perlunya pemerataan akses pendidikan, daya tampung tidak sebanding pertumbuhan siswa dan minat lulusan siswa jenjang SD ke sekolah SMP Negeri.
- 3. Secara keseluruhan, kondisi sarana dan prasarana SMP di Kota Balikpapan menunjukkan perkembangan positif, namun masih menghadapi tantangan pada pemerataan kualitas infrastruktur, kelengkapan laboratorium, penguatan perpustakaan, sanitasi yang inklusif, serta ketersediaan perangkat TIK yang memadai.
- 4. Kekurangan guru di sekolah SMP, meskipun telah dilakukan penempatan guru PPPK, khususnya pada mapel inti seperti Matematika, IPA, Bahasa Inggris, PJOK dan BK.
- 5. Jumlah guru ASN yang pensiun setiap tahun tidak sebanding dengan penambahan formasi baru dan keterbatasan rekrutmen ASN/PPPK sehingga berdampak pada beban mengajar guru yang meningkat (jam mengajar berlebih), beberapa jam pelajaran kosong atau digantikan oleh guru tidak linear dan kualitas penyampaian materi tidak maksimal karena ketidaksesuaian kompetensi.
- 6. Beberapa sekolah membutuhkan tambahan perangkat untuk memenuhi tuntutan asesmen digital dan *project-based learning* serta keterampilan pemanfaatan TIK oleh guru perlu terus ditingkatkan, terutama memasuki era *AI* dan *coding* dasar.

Dari uraian di atas, permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8 Pemetaan Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Penyebab masalah /Akar Masalah
Pemerataan Akses Pendidikan	Keterbatasan formasi penerimaan ASN khususnya tenaga pendidik (guru)	Moratorium Pengangkatan CPNS
	Daya tampung sekolah tidak berbanding lurus dengan kebutuhan sekolah dan pertumbuhan penduduk	Penyediaan Lahan untuk pembangunan USB
	Infrastruktur dan fasilitas penunjang layanan pendidikan belum sesuai standar	Perencanaan yang belum optimal
	Akses Menuju Ke Sekolah yang belum didukung transportasi masal	Belum optimanya semua Sekolah Swasta dalam mengurai permasalahan daya tampung

Masalah Pokok	Masalah	Penyebab masalah /Akar Masalah
		Orang tua siswa masih cenderung memilih sekolah negeri di banding sekolah swasta untuk menyelolahkan anaknya
	Rendahnya partisipasi siswa usia 5-6 Tahun	Belum adanya penerapan syarat Ijazah PAUD untuk masuk SD
		Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak usia dini
Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Masih terdapat guru yang belum tersertifikasi pada jenjang pendidikan PAUD/TK, SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat	Pengangkatn Guru Non Kependidikan
		Belum Optimalnya Program Kapasitas Guru
	Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Pembelajaran	
	Belum optimalnya peran Stakeholder pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan siswa	Program CSR belum menysar ke peningkatan mutu Pendidikan
		Peran Komunitas Belajar Belum Optimal
	Rendahnya kemampuan Literasi dan Numerasi	Kurangnya pengembangan bahan ajar konstektual dan media pembelajaran inovatif
		Kurangnya kampanye Literasi dan numerasi Daerah
		Belum optimalnya kualitas pembelajaran di kelas
		Belum optimalnya manajemen sskolah serta supervisi dan monitoring
	Rendahnya capaian literasi dan numerasi siswa SD dan SMP	Guru belum menerapkan strategi pembelajaran mendalam
		Kurangnya penguatan literasi-numerasi berbasis proyek
		Minimnya pemanfaatan data AKM dan asesmen formatif
	Kualitas dan kompetensi guru belum merata	Guru belum mengikuti pelatihan berbasis pembelajaran mendalam
		Komunitas belajar belum berfungsi aktif secara optimal
		Kurangnya penguasaan teknologi (coding, AI) sesuai kebijakan baru
	Perpustakaan sekolah tidak berfungsi sebagai pusat belajar literasi-numerasi	Fasilitas perpustakaan tidak memadai
		Koleksi buku tidak sesuai kebutuhan siswa

Masalah Pokok	Masalah	Penyebab masalah /Akar Masalah
		Tidak ada program literasi rutin
	Kepala sekolah belum optimal dalam supervisi akademik untuk peningkatan mutu pembelajaran	Supervisi masih bersifat administratif
		Kurangnya pemahaman kepala sekolah tentang pembelajaran mendalam
		Tidak ada sistem refleksi dan coaching yang terstruktur
	Pemanfaatan anggaran sekolah (BOSP) belum mendukung peningkatan kualitas pembelajaran	Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) belum berbasis data asesmen dan kebutuhan siswa
		Tidak ada alokasi dana untuk literasi, numerasi, dan pelatihan
		Sekolah belum paham prioritas pendanaan sesuai kebijakan

Isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan yang dihadapi dan potensi yang dimiliki Kota Balikpapan serta berbagai isu pada level internasional, nasional, dan regional. Oleh karena itu, selain menelaah gambaran umum kondisi daerah dan identifikasi permasalahan pembangunan, perumusan isu strategis juga perlu didahului dengan menelaah berbagai dokumen yang memuat tentang berbagai isu strategis baik di level internasional, nasional dan regional serta isu-isu kewilayahan dan pembangunan berkelanjutan.

Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD level Nasional berfokus pada Pemerataan Akses Pendidikan sejalan dengan agenda nasional untuk menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Di skala Regional yaitu mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, memastikan bahwa arah kebijakan dan rencana pembangunan daerah selaras dengan rencana pembangunan tingkat provinsi. Adapun di skala global, pengaruh globalisasi secara tidak langsung berkontribusi pada isu pelestarian budaya lokal dan dinamika sosial (termasuk pendidikan) di kota heterogen seperti Balikpapan.

1. Isu Strategis Bidang Pendidikan

- Kekurangan Ruang Kelas dan Unit Sekolah Baru (USB): Pertumbuhan jumlah penduduk dan siswa yang cepat tidak diimbangi dengan penambahan infrastruktur pendidikan yang memadai. Masih terdapat jarak antara kebutuhan dan ketersediaan ruang kelas, baik di tingkat PAUD, SD, maupun SMP. Ini menyebabkan beberapa sekolah mengalami kelebihan kapasitas.  
Keterbatasan lahan untuk pembangunan USB dan perencanaan yang belum optimal, seperti yang diidentifikasi sebelumnya, merupakan pemicu langsung dari isu strategis ini.

- **Krisis Kekurangan Guru:** Balikpapan menghadapi krisis kekurangan guru di berbagai jenjang pendidikan, terutama untuk mata pelajaran tertentu seperti Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK), guru agama, guru kelas umum di SD, serta guru Bimbingan Konseling (BK) dan Teknologi Informatika di SMP.  
Krisis ini merupakan konsekuensi langsung dari keterbatasan formasi penerimaan ASN dan moratorium pengangkatan CPNS, serta pengangkatan guru non-kependidikan dan program peningkatan kapasitas guru yang belum optimal.
- **Kualitas Fasilitas dan Tenaga Pendidik:** Variasi dalam kualitas fasilitas pendidikan (bangunan, laboratorium, perpustakaan) dan ketersediaan serta kualitas tenaga pendidik yang tidak merata di berbagai kecamatan memengaruhi kualitas pendidikan yang diterima siswa.  
Hal ini mengindikasikan bahwa masalah infrastruktur yang belum sesuai standar dan guru yang belum tersertifikasi berdampak langsung pada kualitas pembelajaran secara keseluruhan.
- **Jarak dan Infrastruktur Transportasi:** Jarak yang jauh antara rumah dan sekolah, serta kondisi infrastruktur transportasi yang kurang memadai, dapat menjadi hambatan bagi siswa, terutama di jenjang pendidikan dasar dan menengah.  
Hal ini menegaskan kembali masalah akses menuju sekolah yang belum didukung transportasi massal.
- **Kesenjangan partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah:** Isu ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan akses masih perlu ditingkatkan, terutama dalam memastikan semua anak usia sekolah dapat berpartisipasi dalam pendidikan.
- **Belum optimalnya jalur pendidikan non formal sebagai alternatif akses:** Jalur ini belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mengatasi masalah daya tampung dan memberikan akses pendidikan yang fleksibel bagi masyarakat.

## 2. Isu Strategis Bidang Kebudayaan

- **Pelestarian dan Revitalisasi Budaya Lokal (Tergerus Modernisasi dan Pengaruh Luar):** Balikpapan adalah kota transit dengan populasi yang sangat heterogen. Kedatangan berbagai etnis dan budaya dari seluruh Indonesia, ditambah dengan pengaruh globalisasi, berpotensi mengikis nilai-nilai dan praktik budaya lokal asli (seperti budaya Paser Balik atau Kutai yang mungkin kurang dominan). Hal ini merupakan ancaman serius terhadap identitas lokal kota.
- **Pengelolaan Keragaman Budaya dan Potensi Konflik Sosial:** Balikpapan dikenal sebagai kota dengan kerukunan antar umat beragama dan etnis yang baik, terbukti dengan adanya lebih dari 32 etnis dan 109 paguyuban. Namun, dengan terus meningkatnya urbanisasi, terutama dampak dari pembangunan IKN, potensi gesekan antarbudaya bisa muncul jika tidak dikelola dengan baik. Hal ini menuntut pendekatan proaktif dalam mempromosikan integrasi dan toleransi antar etnis.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan yang telah dipetakan di atas dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah, responsif terhadap isu lingkungan hidup strategis, serta adaptif terhadap dinamika global, nasional, dan regional, maka dapat dirumuskan isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.9 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Fasilitas pendidikan terutama SD dan SMP telah tersedia di seluruh wilayah Kota Balikpapan	Keterbatasan formasi penerimaan ASN khususnya tenaga pendidik (guru).	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;	Pemerataan Akses Pendidikan	Akses dan partisipasi pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih rendah	Mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur	Kekurangan Ruang Kelas dan Unit Sekolah Baru (USB): Pertumbuhan jumlah penduduk dan siswa yang cepat tidak diimbangi dengan penambahan infrastruktur pendidikan yang memadai. Masih terdapat jarak antara kebutuhan dan ketersediaan ruang kelas, baik di tingkat PAUD, SD, maupun SMP. Ini menyebabkan beberapa sekolah mengalami kelebihan kapasitas.
Komunitas belajar di Kota Balikpapan cukup banyak	Masih terdapat guru yang belum tersertifikasi pada jenjang pendidikan PAUD/TK, SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat		Peningkatan kualitas Pendidikan	Pemanfaatan bantuan masih belum optimal dan kurangnya dukungan infrastruktur		Krisis Kekurangan Guru: Balikpapan menghadapi krisis kekurangan guru di berbagai jenjang pendidikan, terutama untuk mata pelajaran tertentu seperti Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK), guru agama, guru kelas umum di SD, serta guru Bimbingan Konseling (BK) dan Teknologi Informatika di SMP.
	Daya tampung sekolah tidak berbading lurus dengan kebutuhan sekolah dan pertumbuhan penduduk			Keterbatasan akses internet dan listrik menjadi kendala dalam perluasan akses pendidikan terutama dalam rangka implementasi pembelajaran digital		Kualitas Fasilitas dan Tenaga Pendidik: Variasi dalam kualitas fasilitas pendidikan (bangunan, laboratorium, perpustakaan) dan ketersediaan serta kualitas tenaga pendidik yang tidak merata di berbagai kecamatan memengaruhi kualitas pendidikan yang diterima siswa.



Potensi yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Orang tua siswa masih cenderung memilih sekolah negeri di banding sekolah swasta untuk menyelolahkan anaknya			Kesenjangan partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah		Jarak dan Infrastruktur Transportasi: Jarak yang jauh antara rumah dan sekolah, serta kondisi infrastruktur transportasi yang kurang memadai, dapat menjadi hambatan bagi siswa, terutama di jenjang pendidikan dasar dan menengah.
	Infrastruktur dan fasilitas penunjang layanan pendidikan belum sesuai standar			belum optimalnya jalur pendidikan non formal sebagai alternatif akses		Pelestarian dan Revitalisasi Budaya Lokal (Tergerus Modernisasi dan Pengaruh Luar). Hilangnya Identitas Lokal : Balikpapan adalah kota transit dengan populasi yang sangat heterogen. Kedatangan berbagai etnis dan budaya dari seluruh Indonesia, ditambah dengan pengaruh globalisasi, berpotensi mengikis nilai-nilai dan praktik budaya lokal asli (seperti budaya Paser Balik atau Kutai yang mungkin kurang dominan).
	Stake holder pendidikan belum memiliki program-program yang jelas dan terstruktur serta terintegrasi dalam ikut serta berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan siswa					Pengelolaan Keragaman Budaya dan Potensi Konflik Sosial. Integrasi dan Toleransi Antar Etnis: Balikpapan dikenal sebagai kota dengan kerukunan antar umat beragama dan etnis yang baik, terbukti dengan adanya lebih dari 32 etnis dan 109 paguyuban. Namun, dengan terus meningkatnya urbanisasi, terutama dampak dari pembangunan IKN, potensi gesekan antar budaya bisa muncul jika tidak dikelola

Potensi yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
						dengan baik.

### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

##### 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 ditentukan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya. Selain itu penentuannya juga didasarkan pada sasaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

Adapun visi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yaitu “Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman”. Terdapat lima misi besar yang memandu proses pembangunan daerah yang telah menggambarkan empat dimensi utama pembangunan, yaitu sumber daya manusia, ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan.

- Misi 1 : Membangun dan Mengembangkan Pemerintah yang Bersih dan Professional Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat
- Misi 2 : Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Terpadu yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Masyarakat Balikpapan
- Misi 3 : Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan Terdidik
- Misi 4 : Mengembangkan Perekonomian yang Tumbuh Berkeadilan untuk Semua
- Misi 5 : Konsisten Menjaga Lingkungan Hidup yang Sehat dan Nyaman untuk Semua

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD) memiliki peran strategis dalam mewujudkan Misi Ketiga yang memberikan penekanan pada dua aspek utama pembangunan yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat, yaitu kesehatan dan pendidikan. Pada bidang pendidikan, pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas guna menciptakan generasi yang cerdas dan berdaya saing. Dengan adanya masyarakat yang sehat dan terdidik, diharapkan pembangunan Kota Balikpapan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan sosial dan ekonomi Kota Balikpapan semakin meningkat.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki peran dalam mewujudkan salah satu Tujuan RPJMD yaitu “Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing” yang diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Tujuan RPJMD ini akan tercapai jika sasaran RPJMD “Sumber Daya Manusia Balikpapan yang Berkualitas” tercapai yang diukur dengan indikator Rapor Pendidikan, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, dan Usia Harapan Hidup.

Untuk mewujudkan sasaran kota/RPJMD yaitu Sumber Daya Manusia Balikpapan yang Berkualitas, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menetapkan Tujuan Jangka Menengah (Renstra) yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan Daerah”**. Adapun makna dan alasan pemilihan atau penancangan Tujuan DISDIKBUD tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### 1) Kualitas Pendidikan dalam Pembangunan Daerah

Yang dimaksud dengan kualitas pendidikan dalam pembangunan daerah adalah tingkat kemampuan sistem pendidikan di Kota Balikpapan (mulai dari PAUD sampai pendidikan sekolah menengah pertama) untuk menghasilkan manusia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, dan kreatif, serta mampu

menjadi penggerak pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya di daerah. Kualitas pendidikan tercermin dari kinerja input, proses, dan output/ outcome pendidikan (angka partisipasi, kelulusan, mutu guru, skor asesmen, dll). Rumusan ini sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebut bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan Masyarakat. Pendidikan diharapkan tidak hanya menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga menjadi motor penggerak kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya di Kota Balikpapan. Kualitas pendidikan dipahami secara menyeluruh, mencakup input, proses, output, dan outcome pendidikan. Secara lebih rinci setiap aspek/dimensi dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pemerataan Akses Pendidikan, artinya kualitas pendidikan juga ditandai oleh:

- keterjangkauan layanan pendidikan bagi semua (ketersediaan satuan pendidikan yang merata),
- tidak adanya diskriminasi layanan,
- terpenuhinya layanan untuk anak berkebutuhan khusus,

Pemerataan ini memastikan seluruh anak memperoleh layanan pendidikan minimal pada jenjang pendidikan dasar sebagai bagian dari wajib belajar dan tidak terhambat oleh faktor ekonomi, geografis, gender, maupun kondisi sosial lain. UU Sisdiknas menekankan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan kewajiban pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negara

b. Mutu Pembelajaran. Penekanan mutu pendidikan melalui Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Dalam kerangka ini, kualitas pendidikan daerah mencakup Kualitas Guru dan Tenaga Pendidik (guru yang berkualifikasi, kompeten, dan tersertifikasi, didukung pengembangan profesi berkelanjutan) serta pimpinan sekolah yang visioner dan professional. Tenaga pendidik yang unggul memastikan proses pembelajaran yang efektif, adaptif, dan berpihak pada murid

c. Tata Kelola Pendidikan dan Akuntabilitas meliputi manajemen sekolah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel serta pemanfaatan teknologi dan data pendidikan (DAPODIK) sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan. Tata Kelola Pendidikan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat serta Kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas.

d. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Memadai, bahwa pendidikan berkualitas harus didukung oleh:

- ruang kelas yang layak,
- laboratorium, perpustakaan, dan pusat sumber belajar,
- sarana penunjang termasuk TIK, internet memadai, dan lingkungan sekolah yang aman,
- program afirmasi bagi kelompok rentan dan wilayah perbatasan kota

Sarana ini memastikan proses belajar berjalan optimal dan meningkatkan capaian pembelajaran.

e. *Learning outcomes*, artinya pendidikan yang berkualitas sebagai pondasi SDM Unggul dalam melahirkan lulusan peserta didik yang dapat dilihat melalui:

- peningkatan capaian literasi, numerasi, dan sains,
- keterampilan hidup (*life skills*) dan kesiapan kerja/wirausaha
- memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan *problem solving*,
- berkarakter baik, disiplin, dan berintegritas,
- siap menghadapi perkembangan teknologi, digitalisasi, dan perubahan global.

Hal ini menjadikan SDM Balikpapan lebih siap menghadapi dunia kerja, berwirausaha, dan memberi kontribusi strategis terhadap pembangunan kota.

f. Relevansi Pendidikan dengan Kebutuhan Pembangunan Daerah, bahwa kurikulum dan program pendidikan dirumuskan untuk mengakomodasi muatan lokal dan potensi unggulan daerah (industri, jasa, pariwisata, MICE, dsb) serta menyiapkan peserta didik untuk berpartisipasi dalam ekonomi lokal dan nasional (meningkatkan produktivitas tenaga kerja lokal), kesiapan generasi muda memasuki dunia usaha dan industri di Balikpapan, serta kemampuan adaptasi terhadap transformasi digital. Relevansi ini memastikan pendidikan menjadi pilar pembangunan ekonomi dan sosial kota.

## **2) Peran Kebudayaan dalam Pembangunan Daerah**

UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan bahwa:

- keberagaman kebudayaan daerah adalah kekayaan dan identitas bangsa yang penting untuk memajukan kebudayaan nasional,
- kebudayaan adalah investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa,
- pemajuan kebudayaan dilakukan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan.

Peran Kebudayaan menegaskan bahwa kebudayaan bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga kekuatan yang membentuk identitas, karakter, kreativitas, dan kohesi sosial masyarakat Balikpapan.

- a. Kebudayaan sebagai Identitas dan Karakter Daerah, bahwa kebudayaan, baik budaya lokal maupun yang tumbuh di kota multikultural seperti Balikpapan, menjadi pondasi pembentukan identitas lokal Balikpapan sebagai kota industri dan jasa yang modern namun tetap berakar budaya menghadapi arus globalisasi; membangun karakter masyarakat yang toleran, disiplin, dan gotong-royong; serta rasa kebanggaan dan kepemilikan terhadap daerah. Identitas kuat menciptakan masyarakat yang berdaya saing sekaligus berbudaya. Ketahanan budaya menghadapi arus globalisasi
- b. Pelestarian Warisan Budaya sebagai Aset Daerah. Peran kebudayaan meliputi pelestarian seni, tradisi, bahasa, rumah adat, dan situs budaya; penguatan lembaga budaya dan komunitas kreatif; dokumentasi dan reaktivasi budaya lokal. Pelestarian budaya mendorong ketahanan budaya di tengah modernisasi.
- c. Kebudayaan sebagai Penguat Kohesi Sosial dan Harmoni, bahwa dalam masyarakat Balikpapan yang majemuk, kebudayaan berperan memperkuat toleransi antar suku dan agama, menciptakan ruang dialog antar kelompok dan menjadi ruang kolaborasi lintas komunitas, meminimasi konflik sosial melalui pemahaman nilai-nilai Bersama (memperkuat solidaritas dan partisipasi warga dalam Pembangunan) sehingga mendukung stabilitas sosial dan pembangunan.

- d. Kebudayaan sebagai Motor Ekonomi Kreatif (Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya), artinya kebudayaan berkontribusi pada pengembangan sub sektor ekonomi kreatif, peningkatan daya tarik wisata budaya, serta penciptaan lapangan kerja baru bagi generasi muda.
- e. Kebudayaan sebagai Ruang Ekspresi, Media Edukasi, dan Inovasi. Kebudayaan memungkinkan masyarakat mengekspresikan kreativitas melalui seni dan komunitas budaya, transfer pengetahuan dan nilai antar generasi, dan mengembangkan inovasi berbasis kearifan lokal. Integrasi kebudayaan dalam pendidikan juga tercermin dalam kebijakan muatan lokal dan berbagai program penguatan pendidikan karakter melalui kesenian, tradisi, dan kearifan lokal di Satuan Pendidikan serta pengembangan kreativitas dan daya apresiasi seni peserta didik. Kebudayaan menjadi pilar penting pembentukan SDM yang adaptif dan kreatif.

Dapat disimpulkan bahwa Peran Kebudayaan dalam Pembangunan Daerah dimaknai sebagai kontribusi kebudayaan (meliputi nilai, praktik, ekspresi seni, warisan budaya benda dan takbenda, serta lembaga budaya) dalam membentuk identitas, karakter, kreativitas, dan daya saing masyarakat Kota Balikpapan, serta dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, “Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan Daerah” bermakna bahwa Kota Balikpapan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkomitmen membangun sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, berbudaya, produktif, dan adaptif melalui integrasi pendidikan yang bermutu dengan kebudayaan daerah yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina, sehingga memperkuat identitas, kohesi sosial, kreativitas, dan daya saing ekonomi daerah. Keduanya terintegrasi dalam seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Pendidikan membekali kemampuan dan keterampilan, sedangkan kebudayaan menanamkan identitas, karakter, dan harmoni sosial—keduanya bersama-sama menjadi pilar utama pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, serta memperhatikan permasalahan yang terpetakan dan isu-isu strategis yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, maka perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
Sumber daya manusia Balikpapan yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan Daerah		Rapor Pendidikan (Angka)	74,94	79,4	80	81	82	83	84	
			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (Indeks)	-	-	48	49	50	51	52	
		Meningkatnya Capaian Hasil Belajar dan Aksesibilitas Pendidikan	Rata -rata persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi dan numerasi pendidikan dasar dan kesetaraan (%)	78,48	79,51	80,29	81,07	81,83	82,61	83,39	
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,25	14,35	14,40	14,50	14,59	14,68	14,78	
			Rata - Rata Lama Sekolah (Tahun)	10,99	11,10	11,20	11,30	11,40	11,50	11,60	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
		Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan	Indeks Dimensi Warisan Budaya (Indeks)	-	11,33	24,46	24,77	29,25	29,57	31,99	
			Indeks Dimensi Ekspresi Budaya (Indeks)	-	1,27	26,86	27,31	27,73	28,14	28,49	
			Indeks Dimensi Pendidikan (Indeks)	-	-	15,6	16,7	17,8	18,9	20,0	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70,37	68,04	72,37	74,37	76,37	78,37	80,37	



**Model/Kerangka Logis perencanaan kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut:**

1. Dari 11 sasaran kota yang tercantum dalam RPJMD Kota Balikpapan 2025-2029, sasaran kota “Sumber Daya Manusia Balikpapan yang Berkualitas” dipilih sebagai NSPK/Sasaran RPJMD yang relevan dengan DISDIKBUD Kota Balikpapan dengan mempertimbangkan beberapa hal sbb:
  - a. Berada dalam *core business* DISDIKBUD yang mana memiliki tugas utama dalam penyelenggaraan layanan pendidikan, peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana-prasarana pendidikan, serta penguatan kurikulum, karakter, dan budaya. Semua tugas/fungsi ini secara langsung berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia.
  - b. DISDIKBUD dapat memberi kontribusi nyata pada sasaran pembangunan daerah tersebut sesuai dengan ketentuan kewenangan.
  - c. SDM berkualitas berakar pada kualitas pendidikan
2. Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD) merupakan hasil yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian *Intermediate Outcome* Daerah (Sasaran RPJMD). Sementara itu, sasaran DISDIKBUD merupakan *Immediate Outcome* Perangkat Daerah, yang menunjukkan hasil menengah dari implementasi program dan kegiatan yang terukur dan dapat diobservasi dalam jangka menengah.
3. Jika sasaran strategis perangkat daerah DISDIKBUD Kota Balikpapan tercapai, yaitu Capaian Hasil Belajar dan Aksesibilitas Pendidikan meningkat, melalui keberhasilan implementasi program dan kegiatan, maka tujuan perangkat daerah (*Intermediate Outcome* Perangkat Daerah) akan terwujud, dan hal ini akan langsung mendukung pencapaian level *Intermediate Outcome* Kota (Sasaran RPJMD) serta berkontribusi pada pencapaian *Ultimate Outcome* (Tujuan Kota/RPJMD). Jika DISDIKBUD berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat peran kebudayaan dalam pembangunan daerah, maka secara logis akan mendorong terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia Balikpapan yang berdaya saing dan berkarakter budaya. Dengan demikian, capaian DISDIKBUD menjadi pengungkit bagi terwujudnya Sasaran Kota (RPJMD).
1. Adapun definisi operasional seluruh indikator tujuan, sasaran, dan program DISDIKBUD Kota Balikpapan dapat dilihat pada Bab IV Tabel 4.6 (Indikator Kinerja Daerah/IKD).

### **3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan**

#### **3.2.1 Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah dirumuskan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menetapkan strategi jangka menengah tahun 2025–2029 yang merupakan rencana tindakan komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra.

Penahapan pembangunan dimaksud merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang mengacu pada Penahapan Pembangunan RPJMD dalam dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029. Penahapan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
<p><b>Penguatan Pondasi Layanan Pendidikan yang Merata dan Inklusif.</b> Fokus pada pembangunan dasar sistem layanan pendidikan yang merata dan siap mendukung percepatan partisipasi pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemantapan layanan PAUD–SD–SMP sesuai kebutuhan wilayah</li><li>• Penguatan dasar pendidikan karakter di satuan Pendidikan</li><li>• Penataan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan</li><li>• Pemetaan daya tampung sekolah dan kebutuhan pembangunan unit sekolah baru (PAUD, SD, SMP)</li><li>• Updating data anak tidak sekolah</li></ul>	<p><b>Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dasar.</b> Percepatan pemenuhan layanan bermutu yang menjangkau seluruh kecamatan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan partisipasi pendidikan seluruh jenjang pendidikan dasar</li><li>• Pengembangan program pendidikan karakter yang terstruktur di sekolah</li><li>• Penyediaan tenaga pendidik prioritas untuk mata pelajaran deficit</li><li>• Peningkatan sarana dan prasarana menuju standar minimal</li><li>• Peningkatan pendidikan kesetaraan</li><li>• Updating sasaran penerima manfaat program unggulan pendidikan Kota Balikpapan, baik peserta didik maupun pendidik</li></ul>	<p><b>Akselerasi Pemerataan Mutu Pendidikan dan Penguatan Tata Kelola Pendidikan.</b> Tahun percepatan kualitas dan penguatan tata kelola layanan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Akselerasi pemenuhan mutu pendidikan berbasis Standar Nasional Pendidikan</li><li>• Penguatan program pendidikan karakter</li><li>• Optimalisasi tenaga pendidik melalui pengembangan kompetensi</li><li>• Pengembangan sarpras ramah lingkungan dan inklusif</li></ul>	<p><b>Penguatan Mutu Pembelajaran dan Kompetensi Dasar Peserta Didik Berbasis Data dan Teknologi.</b> Penajaman kualitas dan keberlanjutan sistem pendidikan untuk mencapai daya saing kota:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan daya saing lulusan dasar melalui karakter, literasi, dan numerasi</li><li>• Peningkatan keberlanjutan infrastruktur sekolah</li><li>• Tata kelola adaptif berbasis data dan teknologi Pendidikan</li><li>• Pemantapan program unggulan pendidikan seluruh jenjang</li></ul>	<p><b>Terwujudnya Kota Global yang Nyaman Melalui Pendidikan Bermutu dan Inklusif.</b> Arah pembangunan pendidikan memasuki tahap pemantapan sebagai fondasi kota global:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemantapan layanan pendidikan dasar yang berkualitas, merata, dan adaptif</li><li>• Penguatan keberlanjutan pendidikan karakter di seluruh satuan pendidikan</li><li>• Optimalisasi kontribusi pendidikan dalam pembangunan Kota Balikpapan yang global, nyaman, dan inklusif</li><li>• Pemantapan keberlanjutan program unggulan pendidikan seluruh jenjang</li></ul>

3.2.2 Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Arah Kebijakan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 merupakan rangkaian kerja yang menjadi operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Kebijakan ini juga berpedoman pada arah kebijakan RPJMD serta diselaraskan dengan strategi untuk mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Berikut adalah tabel arah kebijakan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 3.3 Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD (Sektor/Bidang Pendidikan dan Kebudayaan)	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
<p>1. Pemerataan Akses Pendidikan: Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengakses layanan pendidikan yang berkualitas, tanpa terkendala oleh faktor geografis atau sosial ekonomi.</p> <p>2. Peningkatan Kualitas Pembelajaran: Kualitas pembelajaran harus berorientasi pada peningkatan hasil belajar siswa, kompetensi guru, dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan zaman.</p> <p>3. Penguatan Partisipasi Masyarakat: Pelaksanaan program pendidikan harus melibatkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk orang tua, komunitas, dan sektor swasta.</p> <p>4. Tata Kelola Berbasis Data: Pengambilan keputusan dan alokasi anggaran harus didasarkan pada data yang akurat, seperti data hasil asesmen dan kebutuhan sekolah, untuk memastikan efektivitas dan efisiensi.</p> <p>5. Pelestarian Budaya Lokal: Pendidikan juga berfungsi sebagai wadah untuk melestarikan dan merevitalisasi nilai-nilai budaya lokal.</p>	<p>1. Percepatan partisipasi pendidikan dan pengembangan layanan pendidikan dasar (PAUD-SD-SMP-Kesetaraan) sesuai dengan kebutuhan daerah</p> <p>2. Penyediaan beasiswa untuk masyarakat dalam percepatan partisipasi pendidikan di semua jenjang</p> <p>3. Penguatan pengelolaan layanan Pendidikan</p> <p>4. Penguatan tenaga pendidik dan kependidikan</p> <p>5. Penguatan Posyandu dan PAUD sebagai pusat edukasi stimulasi dini; Penguatan kelembagaan dan fungsi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam pemenuhan 6 SPM lintas bidang (kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, Trantibumlinmas, dan sosial)</p> <p>6. Penguatan kualitas pembelajaran</p> <p>7. Peningkatan kesadaran dan peran orang tua terhadap penerapan pengasuhan layak dan stimulasi dini pada anak melalui sekolah parenting</p> <p>8. Percepatan partisipasi pendidikan dan pengembangan layanan pendidikan dasar (PAUD-SD-SMP-Kesetaraan) sesuai dengan kebutuhan daerah</p>	<p>1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 9 tahun pendidikan dasar)</p> <p>2. Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan</p> <p>3. Penguatan Pengelolaan dan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas termasuk peningkatan kompetensi</p> <p>4. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran</p> <p>5. Pelestarian Cagar Budaya Balikpapan</p>	<p>Dilakukan setiap Tahun</p>

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD (Sektor/Bidang Pendidikan dan Kebudayaan)	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapor Pendidikan: Target Rapor Pendidikan ditetapkan meningkat secara bertahap dari 80 pada tahun 2026 menjadi 84 pada tahun 2030.</li> <li>2. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK): IPK ditargetkan mencapai 52 pada tahun 2030, dengan peningkatan bertahap dari tahun 2027.</li> <li>3. Harapan Lama Sekolah (HLS): HLS ditargetkan mencapai 14,78 tahun pada tahun 2030.</li> <li>4. Tingkat Partisipasi Pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partisipasi warga usia 7-12 tahun (Pendidikan Dasar) ditargetkan mencapai 99,98% pada tahun 2030.</li> <li>- Partisipasi warga usia 13-15 tahun (Pendidikan Menengah Pertama) ditargetkan mencapai 99,97% pada tahun 2030.</li> </ul> </li> <li>5. Indikator Kualitas Pembelajaran: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan Literasi SD ditargetkan mencapai 89,66% pada tahun 2030.</li> <li>- Kemampuan Numerasi SD ditargetkan mencapai 78,81% pada tahun 2030.</li> </ul> </li> </ol>			

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD (Sektor/Bidang Pendidikan dan Kebudayaan)	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
<p>2. Relevansi: Kegiatan harus relevan dengan masalah pokok yang teridentifikasi, seperti "keterbatasan formasi guru" dan "rendahnya capaian literasi dan numerasi siswa".</p> <p>3. Kesesuaian Anggaran: Program harus memiliki pagu indikatif yang memadai dan dialokasikan secara efisien untuk mencapai target yang ditetapkan, seperti Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dengan alokasi tahun 2026 sebesar Rp 2 miliar.</p> <p>4. Dampak Terukur: Setiap kegiatan harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur, baik dalam bentuk persentase (misalnya, Indeks Warisan Budaya Lokal) maupun jumlah unit (misalnya, Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Dibangun).</p> <p>5. Keberlanjutan: Program harus dirancang untuk memberikan dampak yang berkelanjutan dan tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek.</p>			

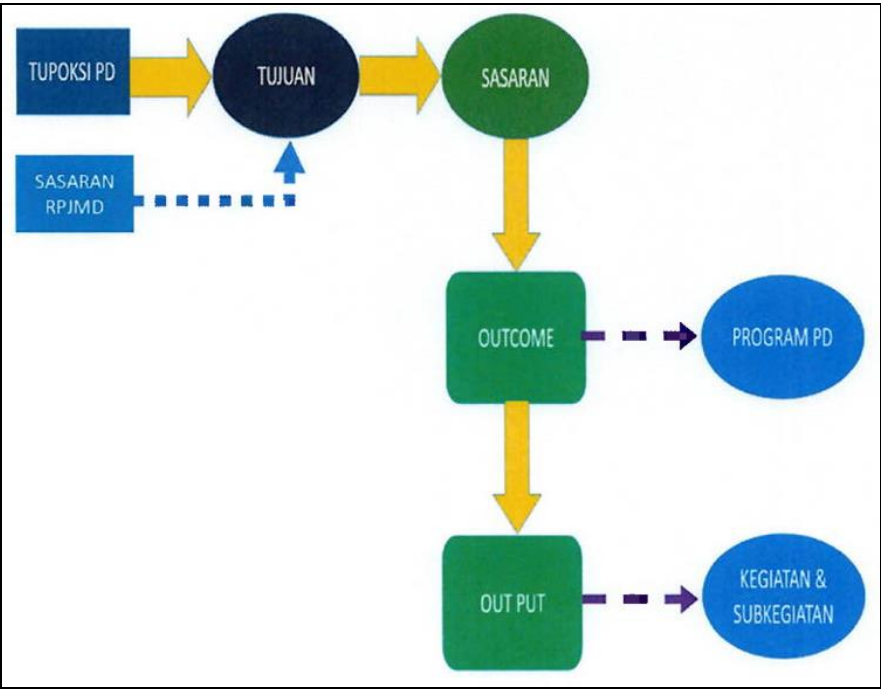
**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN**  
**BIDANG URUSAN**

**4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan**

Rencana Kerja Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan 2026-2030 ini merupakan komitmen kuat untuk mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, berbudaya, dan berdaya saing global. Rencana ini dirancang secara komprehensif, mengintegrasikan upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan dengan pelestarian serta pengembangan kebudayaan daerah. Melalui analisis mendalam terhadap masalah-masalah pokok dan isu-isu strategis, dinas telah merumuskan program dan kegiatan yang terarah, didukung oleh alokasi pendanaan indikatif.

Fokus pada transformasi digital, peningkatan kompetensi pendidik, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan, serta pelestarian warisan budaya lokal menunjukkan pendekatan yang holistik dan adaptif. Rencana ini juga secara eksplisit menyelaraskan diri dengan program prioritas Kepala Daerah, menegaskan sinergi dengan agenda pembangunan kota secara keseluruhan. Dengan implementasi bertahap dan kerangka pemantauan yang ketat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan siap untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang demi masa depan Balikpapan yang lebih baik.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output, yang mana mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Hubungan/kerangka logis antara sasaran perangkat daerah (DISDIKBUD) dengan program dan output kegiatan dapat dijelaskan sbb:

SASARAN 1: Meningkatnya Capaian Hasil Belajar dan Aksesibilitas Pendidikan

Sasaran 1 akan terwujud jika beberapa kondisi dapat tercapai yaitu:

- ✓ Partisipasi dan/atau kemampuan Peserta Didik yang menjadi kewenangan pemerintah kota meningkat. Kondisi ini dapat tercapai/meningkat JIKA Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Nonformal/Kesetaraan terlaksana dengan baik.
- ✓ Kurikulum Muatan Lokal berkualitas. Kondisi ini (kualitas kurikulum muatan lokal meningkat) dapat terwujud JIKA penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, PAUD dan Nonformal terlaksana dengan baik.
- ✓ Mutu pendidik dan tenaga pendidikan meningkat dan distribusinya baik/sesuai. Kondisi ini dapat tercapai/meningkat JIKA pemerataan kualitas dan kuantitas pendidikan dan tenaga kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP), PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terlaksana dengan baik.
- ✓ Kualitas institusi pendidikan meningkat dan distribusi Institusi Pendidikan meningkat baik. Kondisi ini dapat terwujud JIKA penerbitan izin Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

SASARAN 2: Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan

Sasaran 2 akan terwujud jika beberapa kondisi dapat tercapai yaitu:

- ✓ Penetapan Warisan Budaya Kota Balikpapan meningkat. Kondisi ini dapat terwujud JIKA pengelolaan kebudayaan dan pelestarian kesenian tradisional oleh pelaku budaya dan kesenian Kota Balikpapan terlaksana dengan baik.
- ✓ Peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional meningkat. Kondisi ini dapat terwujud salah satunya adalah melalui pembinaan Lembaga Adat Kota Balikpapan.
- ✓ Akses masyarakat terhadap informasi sejarah meningkat. Kondisi ini dapat terwujud salah satunya adalah jika pembinaan sejarah lokal di Kota Balikpapan dapat terlaksana dengan baik.
- ✓ Pelestarian warisan budaya meningkat. Kondisi ini dapat terwujud JIKA penetapan dan pengelolaan cagar budaya Kota Balikpapan terlaksana dengan baik.

SASARAN 3: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sasaran 3 akan terwujud jika kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan meningkat, baik dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Kondisi ini dapat tercapai/meningkat JIKA beberapa kondisi terpenuhi/terlaksana dengan baik antara lain:

- dokumen perencanaan perangkat daerah selaras dengan dokumen penganggaran;
- pengelolaan keuangan berjalan secara efisien, transparan, dan akuntabel;
- barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dapat dikelola dengan tertib, efisien, efektif, akuntabel, dan transparan serta dapat berfungsi optimal;
- Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah meningkat;
- Layanan umum perkantoran Perangkat Daerah (DISDIKBUD) berjalan dengan baik;
- Kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dapat terpenuhi;
- Operasional Umum Perangkat Daerah berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian butir 2 di atas, maka tersusunlah program dan kegiatan terukur sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah berikut ini:



Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							
- Sumber daya manusia Balikpapan yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan Daerah				Rapor pendidikan (Angka)		
					Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (Indeks)		
		Meningkatnya Capaian Hasil Belajar dan Aksesibilitas Pendidikan			Rata -rata persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi dan numerasi pendidikan dasar dan kesetaraan (%)		
					Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
					Rata - Rata Lama Sekolah (Tahun)		
		Meningkatnya Partisipasi dan/atau kemampuan Peserta Didik yang menjadi kewenangan pemerintah kota			Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Kesetaraan (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Iklim Keamanan SMP (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Iklim Keamanan Kesetaraan (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca SD/Sederajat (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SD/Sederajat (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca SMP/Sederajat (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SMP/Sederajat (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Iklim Keamanan PAUD (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Iklim Keamanan SD (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi Kesetaraan (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.01.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.01.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.01.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01.0009 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01.0010 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01.0011 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
					Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1.01.02.2.01.0019 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
					Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	
					Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01.0032 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1.01.02.2.01.0033 - Pemeliharaan Mebel Sekolah	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.2.01.0041 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
					Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1.01.02.2.01.0042 - Penyediaan infrastruktur TIK	
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1.01.02.2.01.0045 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (Unit)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.02.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.02.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.02.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
					Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium	
					Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.02.0007 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	
					Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.02.0008 - Pembangunan Asrama Sekolah	
					Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.02.0010 - Pembangunan Fasilitas Parkir	
					Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.02.0011 - Pembangunan Kantin Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
					Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	
					Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1.01.02.2.02.0019 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	
					Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.02.0022 - Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	
					Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.02.0023 - Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
					Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
					Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (Unit)	1.01.02.2.02.0063 - Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
				Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara (Unit)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi (Orang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
					Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD	
					Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03.0008 - Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	
					Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan Perlengkapan PAUD	
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
					Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
					Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara (Unit)	1.01.02.2.03.0020 - Pemeliharaan Mebel Sekolah	
					Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi (Orang)	1.01.02.2.03.0021 - Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.03.0022 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.03.0028 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.2.03.0029 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1.01.02.2.03.0031 - Penyediaan infrastruktur TIK	
					Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	1.01.02.2.03.0032 - Penataan Ruang/Sudut Baca	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.03.0033 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	1.01.02.2.03.0034 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	
					Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1.01.02.2.03.0035 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.03.0036 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.2.03.0037 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
					Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1.01.02.2.03.0038 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
					Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.03.0040 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1.01.02.2.03.0042 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1.01.02.2.03.0043 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	
					Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.03.0044 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.03.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1.01.02.2.03.0049 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.03.0050 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
				Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi (Orang)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi (Orang)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1.01.02.2.04.0021 - Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi (Orang)	1.01.02.2.04.0023 - Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.04.0024 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.04.0025 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.04.0026 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.04.0028 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.2.04.0030 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.2.04.0031 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
					Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi (Orang)	1.01.02.2.04.0032 - Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1.01.02.2.04.0033 - Penyediaan infrastruktur TIK	
					Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	1.01.02.2.04.0034 - Penataan Ruang/Sudut Baca	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.2.04.0035 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
					Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1.01.02.2.04.0037 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.04.0038 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.04.0039 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.04.0040 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
					Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.04.0043 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	
					Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.04.0044 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
					Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.04.0045 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
					Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.04.0047 - Pembangunan Ruang Laboratorium	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.04.0048 - Pengadaan Mebel Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1.01.02.2.04.0049 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)	1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	
					Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.04.0053 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	
					Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1.01.02.2.04.0054 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.04.0056 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.04.0057 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1.01.02.2.04.0058 - Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kualitas Kurikulum Muatan Lokal		Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.04.0059 - Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.04.0060 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.04.0061 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
				Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
					Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
					Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
					Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
					Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1.01.03.2.01.0007 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
					Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai (Buku)	1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
					Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku)	1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
					Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
					Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun (Dokumen)	1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
					Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
				Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai (Buku)	1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
					Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku)	1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1.01.03.2.02.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
					Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku)	1.01.03.2.02.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
					Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai (Buku)	1.01.03.2.02.0004 - Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
					Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun (Dokumen)	1.01.03.2.02.0005 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
					Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1.01.03.2.02.0006 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
				Terlaksananya Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Kependidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan		Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
				Terlaksananya Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.01.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.01.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
				Terlaksananya Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.02.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan	Meningkatnya Warisan Budaya Kota Balikpapan yang Ditetapkan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.02.0003 - Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
					Indeks Dimensi Warisan Budaya (Indeks)		
					Indeks Dimensi Ekspresi Budaya (Indeks)		
					Indeks Dimensi Pendidikan (Indeks)		
					Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Pencatatan (%)	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
				Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina (Lembaga)	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina (Orang)	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
					Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	2.22.02.2.01.0003 - Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina (Orang)	2.22.02.2.01.0004 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan	
					Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina (Lembaga)	2.22.02.2.01.0005 - Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	
				Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
					Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	
					Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	2.22.02.2.02.0003 - Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional		Persentase Penduduk Usia 10 tahun ke atas yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/Pendukung Pertunjukan Seni Dalam 3 Bulan Terakhir (%)	2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	
				Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	2.22.03.2.01.0002 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	
					Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah		Persentase Penduduk Usia 10 Tahun keatas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah/Warisan Dunia Dalam Setahun Terakhir (%)	2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
				Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	2.22.04.2.01.0001 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan		Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Terhadap Total Pendaftaran (%)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
				Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya	
				Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi (Objek)	2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	2.22.05.2.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya	
					Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi (Objek)	2.22.05.2.02.0004 - Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	
			Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terwujudnya Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Efisien, Transparan, dan Akuntabel.	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terwujudnya Pengelolaan Barang Daerah yang Tertib, Efisien, Efektif, Akuntabel, dan Transparan.	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terwujudnya Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terwujudnya Layanan Umum Perkantoran Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terwujudnya Operasional Umum Perangkat Daerah.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar berfungsi optimal.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

**4.2 Pendanaan Indikatif**

Untuk merealisasikan program, kegiatan dan subkegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan maka perlu didukung oleh dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), APBD Provinsi dan APBN. Adapun proyeksi pendanaan indikatif tahun 2026 s/d 2030 tercantum pada lampiran tabel berikut ini

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				874.338.097.858,00		1.083.906.809.000,00		1.115.981.645.500,00		1.137.604.130.625,00		1.159.956.369.219,00		
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				594.907.808.621,00		672.512.584.400,00		700.236.727.269,00		718.743.530.407,00		734.395.495.991,00		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	-	88,18	594.907.808.621,00	89,18	672.512.584.400,00	89,39	700.236.727.269,00	89,59	718.743.530.407,00	89,80	734.395.495.991,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000,00		260.000.000,00		338.000.000,00		439.400.000,00		571.220.000,00		
Terwujudnya Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	12	200.000.000,00	12	260.000.000,00	12	338.000.000,00	12	439.400.000,00	12	571.220.000,00		
1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000,00		260.000.000,00		338.000.000,00		439.400.000,00		571.220.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	12	200.000.000,00	12	260.000.000,00	12	338.000.000,00	12	439.400.000,00	12	571.220.000,00		
1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				590.309.521.000,00		666.991.227.450,00		693.664.283.188,00		711.011.899.277,00		725.246.669.136,00		
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Efisien, Transparan, dan Akuntabel.	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	14	13	590.309.521.000,00	13	666.991.227.450,00	13	693.664.283.188,00	13	711.011.899.277,00	13	725.246.669.136,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.572	3.572		5.600		5.600		5.600					
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4					
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	4		4		4		4					
1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				589.817.065.000,00		666.486.783.450,00		693.144.254.788,00		710.471.611.157,00		724.680.043.380,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.572	3.572	589.817.065.000,00	5.600	666.486.783.450,00	5.600	693.144.254.788,00	5.600	710.471.611.157,00	5.600	724.680.043.380,00		
1.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				452.496.000,00		452.496.000,00		452.496.000,00		452.496.000,00		452.496.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	14	13	452.496.000,00	13	452.496.000,00	13	452.496.000,00	13	452.496.000,00	13	452.496.000,00		
1.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan				19.980.000,00		25.974.000,00		33.766.200,00		43.896.060,00		57.064.878,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	4	19.980.000,00	4	25.974.000,00	4	33.766.200,00	4	43.896.060,00	4	57.064.878,00		
1.01.012.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				19.980.000,00		25.974.000,00		33.766.200,00		43.896.060,00		57.064.878,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	19.980.000,00	4	25.974.000,00	4	33.766.200,00	4	43.896.060,00	4	57.064.878,00		
1.01.012.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				20.000.000,00		26.000.000,00		33.800.000,00		43.940.000,00		57.122.000,00		
Terwujudnya Pengelolaan Barang Daerah yang Tertib, Efisien, Efektif, Akuntabel, dan Transparan.	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	20.000.000,00	4	26.000.000,00	4	33.800.000,00	4	43.940.000,00	4	57.122.000,00		
1.01.012.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				20.000.000,00		26.000.000,00		33.800.000,00		43.940.000,00		57.122.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	20.000.000,00	4	26.000.000,00	4	33.800.000,00	4	43.940.000,00	4	57.122.000,00		
1.01.012.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				19.598.000,00		25.477.400,00		33.120.620,00		43.056.806,00		55.973.847,00		
Terwujudnya Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	85	150	19.598.000,00	150	25.477.400,00	150	33.120.620,00	150	43.056.806,00	150	55.973.847,00		
1.01.012.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				19.598.000,00		25.477.400,00		33.120.620,00		43.056.806,00		55.973.847,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	85	150	19.598.000,00	150	25.477.400,00	150	33.120.620,00	150	43.056.806,00	150	55.973.847,00		
1.01.012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				12.14.492.905,00		1.421.745.595,00		1.669.870.113,00		1.971.205.212,00		2.339.954.198,00		
Terwujudnya Layanan Umum Perkantoran Perangkat Daerah.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	148	150	12.14.492.905,00	150	1.421.745.595,00	150	1.669.870.113,00	150	1.971.205.212,00	150	2.339.954.198,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	16	30		30		30		30		30			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	27	20		20		20		20		20			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.833	6.048		6.048		6.048		6.048		6.048			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	21	10		10		10		10		10			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10		10		10		10		10			
1.01.012.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.988.000,00		12.984.400,00		16.879.720,00		21943.636,00		28.526.726,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	27	20	9.988.000,00	20	12.984.400,00	20	16.879.720,00	20	21943.636,00	20	28.526.726,00		
1.01.012.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				199.916.800,00		219.908.480,00		241899.328,00		266.089.280,00		292.698.186,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	16	30	199.916.800,00	30	219.908.480,00	30	241899.328,00	30	266.089.280,00	30	292.698.186,00		
1.01.012.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				499.999.890,00		549.999.879,00		604.999.866,00		665.499.853,00		732.049.838,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	499.999.890,00	10	549.999.879,00	10	604.999.866,00	10	665.499.853,00	10	732.049.838,00		
1.01.012.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				49.994.175,00		54.993.592,00		60.492.951,00		66.542.246,00		73.196.471,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	21	10	49.994.175,00	10	54.993.592,00	10	60.492.951,00	10	66.542.246,00	10	73.196.471,00		
1.01.012.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				34.998.000,00		48.384.000,00		60.480.000,00		72.576.000,00		84.672.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.833	6.048	34.998.000,00	6.048	48.384.000,00	6.048	60.480.000,00	6.048	72.576.000,00	6.048	84.672.000,00		
1.01.012.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				49.998.040,00		54.997.844,00		60.497.628,00		66.547.391,00		73.202.130,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	2	49.998.040,00	2	54.997.844,00	2	60.497.628,00	2	66.547.391,00	2	73.202.130,00		
1.01.012.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19.598.000,00		25.477.400,00		33.120.620,00		43.056.806,00		55.973.847,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	148	150	19.598.000,00	150	25.477.400,00	150	33.120.620,00	150	43.056.806,00	150	55.973.847,00		
1.01.012.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				350.000.000,00		455.000.000,00		591.500.000,00		768.950.000,00		999.635.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	3	350.000.000,00	3	455.000.000,00	3	591.500.000,00	3	768.950.000,00	3	999.635.000,00		
1.01.012.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				202.800.000,00		263.640.000,00		342.732.000,00		445.551.600,00		579.217.080,00		
Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	202.800.000,00	5	263.640.000,00	6	342.732.000,00	6	445.551.600,00	7	579.217.080,00		
1.01.012.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				202.800.000,00		263.640.000,00		342.732.000,00		445.551.600,00		579.217.080,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	202.800.000,00	5	263.640.000,00	6	342.732.000,00	6	445.551.600,00	7	579.217.080,00		
101012.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.150.612.296,00		2.580.734.755,00		3.096.881.708,00		3.716.258.052,00		4.459.509.663,00		
Terwujudnya Operasional Umum Perangkat Daerah.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	39	10	2.150.612.296,00	10	2.580.734.755,00	10	3.096.881.708,00	10	3.716.258.052,00	10	4.459.509.663,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
101012.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				624.700.000,00		749.640.000,00		899.568.000,00		1079.481.600,00		1295.377.920,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	624.700.000,00	4	749.640.000,00	4	899.568.000,00	4	1079.481.600,00	4	1295.377.920,00		
101012.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1525.912.296,00		1831.094.755,00		2.197.313.708,00		2.636.776.452,00		3.164.131.743,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	39	10	1525.912.296,00	10	1831.094.755,00	10	2.197.313.708,00	10	2.636.776.452,00	10	3.164.131.743,00		
101012.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				199.306.000,00		219.236.600,00		241.151.260,00		265.276.286,00		291.803.914,00		
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar berfungsi optimal.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	3	199.306.000,00	3	219.236.600,00	3	241.151.260,00	3	265.276.286,00	3	291.803.914,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	43	56		60		60		60		60			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	175	175		175		175		175		175			
101012.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				49.886.000,00		54.874.600,00		60.362.060,00		66.398.266,00		73.038.092,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	43	56	49.886.000,00	60	54.874.600,00	60	60.362.060,00	60	66.398.266,00	60	73.038.092,00		
101012.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				49.420.000,00		54.362.000,00		59.789.200,00		65.778.020,00		72.355.822,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	175	175	49.420.000,00	175	54.362.000,00	175	59.789.200,00	175	65.778.020,00	175	72.355.822,00		
101012.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	3	100.000.000,00	3	110.000.000,00	3	121.000.000,00	3	133.100.000,00	3	146.410.000,00		
10102 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				278.470.213.237,00		408.484.224.600,00		413.014.918.231,00		416.245.600.218,00		422.890.873.228,00		
Meningkatnya Partisipasi dan/atau kemampuan Peserta Didik yang menjadi kewenangan pemerintah kota	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	99,81	99,94	278.470.213.237,00	99,95	408.484.224.600,00	99,96	413.014.918.231,00	99,97	416.245.600.218,00	99,98	422.890.873.228,00	1012.22.0.00.010000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Kesetaraan (%)	64,98	69,38		71,58		73,78		75,98		78,18			
	Iklim Keamanan SM P (%)	67,31	66,59		68,59		70,59		72,59		74,59			
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	99,26	99,89		99,91		99,93		99,95		99,97			
	Iklim Keamanan Kesetaraan (%)	67,31	66,59		68,59		70,59		72,59		74,59			
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	50,01	55,27		57,27		59,27		62,27		65,27			
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	54,44	55,67		56,67		57,67		58,67		59,67			
	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca SD/Sederajat (%)	85,56	88,33		88,94		89,56		90,17		90,79			
	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SD/Sederajat (%)	78,31	78,93		79,25		79,56		79,87		80,18			
	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Lit erasi membaca SM P/Sederajat (%)	91,82	92,11		92,25		92,39		92,54		92,68			
	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SM P/Sederajat (%)	88,26	88,60		88,78		88,95		89,12		89,29			
	Iklim Keamanan PAUD (%)	73,21	75,59		76,59		77,59		78,59		79,59			
	Iklim Keamanan SD (%)	73,37	75,33		75,43		75,53		75,63		75,73			
	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi Kesetaraan (%)	61,99	64,39		65,59		66,79		67,99		69,19			
1.01.02.2.01- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				123.105.544.288,00		223.234.221600,00		226.867.575.201,00		229.257.980.759,00		235.017.915.074,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	-	2	123.105.544.288,00	2	223.234.221600,00	2	226.867.575.201,00	2	229.257.980.759,00	2	235.017.915.074,00		
	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	-	30		30		30		30		30			
	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	620	3		3		3		3		3			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	195	200		202		204		205		207			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	-	3		3		3		3		3			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	2.888	3.310		3.330		3.350		3.370		3.390			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	1	9.690		9.710		9.730		9.750		9.770			
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	13.100	13.000		15.000		15.000		15.000		15.000			
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	70	4		4		4		4		4			
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	3	1		1		1		1		1			
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	150	5		5		5		5		5			
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	195	195		205		205		205		205			
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	198	200		202		204		205		207			
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	6	3		3		3		3		3			
	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	382	639		700		700		700		700			
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	15.000	12.050		12.075		12.080		12.085		12.090			
	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	185	220		225		230		230		230			
	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	217	220		225		230		230		230			
	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	195	200		202		204		205		207			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	195	200		202		204		205		207			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	219	20		20		20		20		20			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	5	10		10		10		10		10			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	-	20		20		20		20		20			
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	3	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	17	20		20		20		20		20			
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	15	5		5		5		5		5			
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	195	200		202		204		205		207			
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	280	650		21.195		21.500		21.500		21.500			
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	195	200		202		204		205		207			
1.01.02.2.01.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				2.000.000.000,00		2.100.000.000,00		2.520.000.000,00		3.024.000.000,00		3.628.800.000,00		
Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	-	1	2.000.000.000,00	1	2.100.000.000,00	1	2.520.000.000,00	1	3.024.000.000,00	1	3.628.800.000,00		
1.01.02.2.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				100.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	2	1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00		
1.01.02.2.01.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				100.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	3	1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00		
1.01.02.2.010005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah				100.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		
Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	3	1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00		
1.01.02.2.010006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				100.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	5	10	100.000.000,00	10	105.000.000,00	10	105.000.000,00	10	105.000.000,00	10	105.000.000,00		
1.01.02.2.010009 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				100.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5	5	100.000.000,00	5	1.000.000.000,00	5	1.000.000.000,00	5	1.000.000.000,00	5	1.000.000.000,00		
1.01.02.2.010010 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				100.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5	5	100.000.000,00	5	1.000.000.000,00	5	1.000.000.000,00	5	1.000.000.000,00	5	1.000.000.000,00		
1.01.02.2.010011 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				100.000.000,00		1.160.012.562,00		1.160.012.562,00		1.160.012.562,00		1.160.012.562,00		
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	150	5	100.000.000,00	5	1.160.012.562,00	5	1.160.012.562,00	5	1.160.012.562,00	5	1.160.012.562,00		
1.01.02.2.010014 - Pengadaan Mebel Sekolah				1.000.000.000,00		2.500.000.000,00		3.500.000.000,00		4.000.000.000,00		5.000.000.000,00		
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	620	3	1.000.000.000,00	3	2.500.000.000,00	3	3.500.000.000,00	3	4.000.000.000,00	3	5.000.000.000,00		
1.01.02.2.010016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah				100.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	70	4	100.000.000,00	4	500.000.000,00	4	500.000.000,00	4	500.000.000,00	4	500.000.000,00		
1.01.02.2.010019 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				100.000.000,00		2.500.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		4.000.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	-	20	100.000.000,00	20	2.500.000.000,00	20	3.000.000.000,00	20	3.000.000.000,00	20	4.000.000.000,00		
1.01.02.2.010025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				99.001.800,00		1.090.983.638,00		1.534.728.214,00		1.096.044.296,00		1.223.033.816,00		
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	15.000	12.050	99.001.800,00	12.075	1.090.983.638,00	12.080	1.534.728.214,00	12.085	1.096.044.296,00	12.090	1.223.033.816,00		
1.01.02.2.010026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				54.119.026.488,00		60.000.000.000,00		60.000.000.000,00		60.000.000.000,00		60.000.000.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	1	9.690	54.119.026.488,00	9.710	60.000.000.000,00	9.730	60.000.000.000,00	9.750	60.000.000.000,00	9.770	60.000.000.000,00		
1.01.02.2.010027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				7.150.000.000,00		8.900.000.000,00		9.000.000.000,00		9.100.000.000,00		9.200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	2.888	3.310	7.150.000.000,00	3.330	8.900.000.000,00	3.350	9.000.000.000,00	3.370	9.100.000.000,00	3.390	9.200.000.000,00		
1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				198.510.000,00		1500.000.000,00		1500.000.000,00		2.000.000.000,00		1300.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	217	220	198.510.000,00	225	1500.000.000,00	230	1500.000.000,00	230	2.000.000.000,00	230	1300.000.000,00		
1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				21.135.410.000,00		22.192.180.500,00		23.301.789.525,00		24.466.879.001,00		25.690.222.951,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	185	220	21.135.410.000,00	225	22.192.180.500,00	230	23.301.789.525,00	230	24.466.879.001,00	230	25.690.222.951,00		
1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				100.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	382	639	100.000.000,00	700	500.000.000,00	700	500.000.000,00	700	500.000.000,00	700	500.000.000,00		
1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar				100.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	2	1	100.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.01.02.2.01.0032 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar				100.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	-	2	100.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00		
1.01.02.2.01.0033 - Pemeliharaan Mebel Sekolah				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	-	30	50.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00		
1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				28.565.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	195	200	28.565.000,00	202	60.000.000,00	204	60.000.000,00	205	60.000.000,00	207	60.000.000,00		
1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				30.065.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1	1	30.065.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		
1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				40.190.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		160.000.000,00		
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	195	200	40.190.000,00	202	130.000.000,00	204	140.000.000,00	205	150.000.000,00	207	160.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				60.350.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		170.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	195	195	60.350.000,00	205	150.000.000,00	205	150.000.000,00	205	150.000.000,00	205	170.000.000,00		
1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				29.935.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	29.935.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00		
1.01.02.2.01.0041 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				31.435.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	195	200	31.435.000,00	202	70.000.000,00	204	70.000.000,00	205	70.000.000,00	207	70.000.000,00		
1.01.02.2.01.0042 - Penyediaan infrastruktur TIK				0,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		
Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	-	3	0,00	3	20.000.000.000,00	3	20.000.000.000,00	3	20.000.000.000,00	3	20.000.000.000,00		
1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				31.890.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1	1	31.890.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.01.02.2.01.0045 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				20.380.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	198	200	20.380.000,00	202	30.000.000,00	204	30.000.000,00	205	30.000.000,00	207	30.000.000,00		
1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				13.000.000.000,00		13.580.028.000,00		13.580.028.000,00		13.580.028.000,00		13.580.028.000,00		
Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	13.100	13.000	13.000.000.000,00	15.000	13.580.028.000,00	15.000	13.580.028.000,00	15.000	13.580.028.000,00	15.000	13.580.028.000,00		
1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				1.000.000.000,00		15.000.000.000,00		15.000.000.000,00		15.000.000.000,00		15.000.000.000,00		
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	15	5	1.000.000.000,00	5	15.000.000.000,00	5	15.000.000.000,00	5	15.000.000.000,00	5	15.000.000.000,00		
1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				500.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	219	20	500.000.000,00	20	3.000.000.000,00	20	3.000.000.000,00	20	3.000.000.000,00	20	3.000.000.000,00		
1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				395.386.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	195	200	395.386.000,00	202	300.000.000,00	204	350.000.000,00	205	400.000.000,00	207	450.000.000,00		
1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				900.000.000,00		1.725.000.000,00		1.725.000.000,00		1.725.000.000,00		1.725.000.000,00		
Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	195	200	900.000.000,00	202	1.725.000.000,00	204	1.725.000.000,00	205	1.725.000.000,00	207	1.725.000.000,00		
1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				500.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	17	20	500.000.000,00	20	4.000.000.000,00	20	4.000.000.000,00	20	4.000.000.000,00	20	4.000.000.000,00		
1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				18.585.400.000,00		18.496.016.900,00		18.496.016.900,00		18.496.016.900,00		20.820.817.745,00		
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	280	650	18.585.400.000,00	21.195	18.496.016.900,00	21.500	18.496.016.900,00	21.500	18.496.016.900,00	21.500	20.820.817.745,00		
1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				1.000.000.000,00		40.000.000.000,00		40.000.000.000,00		40.000.000.000,00		40.000.000.000,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	6	3	1.000.000.000,00	3	40.000.000.000,00	3	40.000.000.000,00	3	40.000.000.000,00	3	40.000.000.000,00		
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				98.346.380.000,00		99.664.818.000,00		100.619.416.180,00		101.341.773.341,00		102.109.013.575,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	4	98.346.380.000,00	4	99.664.818.000,00	5	100.619.416.180,00	5	101.341.773.341,00	6	102.109.013.575,00		
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	-	487		550		605		670		737			
	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	-	2		3		4		5		6			
	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (Unit)	-	4		5		6		7		8			
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	-	800		3.840		3.840		3.840		3.840			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	78	80		80		81		82		83			
	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	-	3		3		4		5		6			
	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	-	3		4		5		6		7			
	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	-	3		4		5		6		7			
	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	-	4		5		6		7		8			
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	-	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	-	2		2		2		2		2			
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	-	3		3		3		3		3			
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat (Ruang)	-	3		4		5		6		7			
	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	-	2.940		3.234		3.557		3.913		4.304			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	-	80		80		81		82		83			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	900	635		635		635		635		635			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	-	250		250		250		250		250			
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	31.155	31.920		32.304		32.304		32.304		32.304			
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	-	10		10		10		10		10			
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1	3		4		5		6		7			
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat (Ruang)	-	3		4		5		6		7			
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/ atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	-	80		80		81		82		83			
	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	10.210	10.375		11.359		11.487		11.615		11.743			
	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	78	80		80		81		82		83			
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	-	80		80		81		82		83			
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	-	7		8		8,80		9,68		11			
	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat (Ruang)	-	13		15		17		19		21			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	5	3		4		5		6		7			
	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	-	3		3		5		6		7			
	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	-	3		4		5		6		7			
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	5	3		4		5		6		7			
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	-	3		4		5		6		7			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	20	22		25		28		31		34			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	-	26		29		32		36		40			
	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	79	80		80		81		82		83			
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	94	95		95		96		97		98			
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1200	1400		1600		1800		2.000		2.200			
	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	50	50		50		50		50		50			
	1.01.02.2.02.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)						24.200.000.000,00				17.620.000.000,00			
Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	2	1	24.200.000.000,00	1	17.620.000.000,00	1	17.893.200.000,00	1	17.893.200.000,00	1	17.893.200.000,00		
1.01.02.2.02.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	5	3	200.000.000,00	4	220.000.000,00	5	242.000.000,00	6	266.200.000,00	7	292.820.000,00		
1.01.02.2.02.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah				200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		
Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1	3	200.000.000,00	4	220.000.000,00	5	242.000.000,00	6	266.200.000,00	7	292.820.000,00		
1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium				200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		
Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	5	3	200.000.000,00	4	220.000.000,00	5	242.000.000,00	6	266.200.000,00	7	292.820.000,00		
1.01.02.2.02.0007 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula				200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		
Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	-	3	200.000.000,00	3	220.000.000,00	5	242.000.000,00	6	266.200.000,00	7	292.820.000,00		
1.01.02.2.02.0008 - Pembangunan Asrama Sekolah				50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	-	2	50.000.000,00	3	55.000.000,00	4	60.500.000,00	5	66.550.000,00	6	73.205.000,00		
10102.2.02.0010 - Pembangunan Fasilitas Parkir				100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		
Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	-	3	100.000.000,00	3	110.000.000,00	4	121.000.000,00	5	133.100.000,00	6	146.410.000,00		
10102.2.02.0011 - Pembangunan Kantin Sekolah				100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		
Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	-	4	100.000.000,00	5	110.000.000,00	6	121.000.000,00	7	133.100.000,00	8	146.410.000,00		
10102.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	20	22	200.000.000,00	25	220.000.000,00	28	242.000.000,00	31	266.200.000,00	34	292.820.000,00		
10102.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		
Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	-	13	200.000.000,00	15	220.000.000,00	17	242.000.000,00	19	266.200.000,00	21	292.820.000,00		
10102.2.02.0016 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	-	3	100.000.000,00	4	110.000.000,00	5	121.000.000,00	6	133.100.000,00	7	146.410.000,00		
10102.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	-	3	100.000.000,00	4	110.000.000,00	5	121.000.000,00	6	133.100.000,00	7	146.410.000,00		
10102.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium				100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		
Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	-	3	100.000.000,00	4	110.000.000,00	5	121.000.000,00	6	133.100.000,00	7	146.410.000,00		
10102.2.02.0019 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula				100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		
Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	-	3	100.000.000,00	4	110.000.000,00	5	121.000.000,00	6	133.100.000,00	7	146.410.000,00		
10102.2.02.0022 - Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir				100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		
Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	-	3	100.000.000,00	4	110.000.000,00	5	121.000.000,00	6	133.100.000,00	7	146.410.000,00		
10102.2.02.0023 - Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah				100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		
Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	-	3	100.000.000,00	4	110.000.000,00	5	121.000.000,00	6	133.100.000,00	7	146.410.000,00		
10102.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	-	26	100.000.000,00	29	110.000.000,00	32	121.000.000,00	36	133.100.000,00	40	146.410.000,00		
10102.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah				100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	-	2.940	100.000.000,00	3.234	110.000.000,00	3.557	121.000.000,00	3.913	133.100.000,00	4.304	146.410.000,00		
1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah				50.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	-	10	50.000.000,00	10	600.000.000,00	10	600.000.000,00	10	600.000.000,00	10	600.000.000,00		
1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama				13.500.000.000,00		14.500.000.000,00		14.500.000.000,00		14.500.000.000,00		14.500.000.000,00		
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	10.210	10.375	13.500.000.000,00	11.359	14.500.000.000,00	11.487	14.500.000.000,00	11.615	14.500.000.000,00	11.743	14.500.000.000,00		
1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.200	1.400	50.000.000,00	1.600	1.000.000.000,00	1.800	1.000.000.000,00	2.000	1.000.000.000,00	2.200	1.000.000.000,00		
1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				22.802.000.000,00		23.000.000.000,00		23.000.000.000,00		23.000.000.000,00		23.000.000.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	-	250	22.802.000.000,00	250	23.000.000.000,00	250	23.000.000.000,00	250	23.000.000.000,00	250	23.000.000.000,00		
1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				6.000.000.000,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	900	635	6.000.000.000,00	635	6.000.000.000,00	635	6.000.000.000,00	635	6.000.000.000,00	635	6.000.000.000,00		
1.01.02.2.02.0041- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				50.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	79	80	50.000.000,00	80	550.000.000,00	81	550.000.000,00	82	550.000.000,00	83	550.000.000,00		
1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				17.354.380.000,00		19.089.818.000,00		19.280.716.180,00		19.473.523.341,00		19.668.258.575,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	94	95	17.354.380.000,00	95	19.089.818.000,00	96	19.280.716.180,00	97	19.473.523.341,00	98	19.668.258.575,00		
1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				100.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	50	50	100.000.000,00	50	500.000.000,00	50	500.000.000,00	50	500.000.000,00	50	500.000.000,00		
1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				30.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	-	80	30.000.000,00	80	50.000.000,00	81	50.000.000,00	82	50.000.000,00	83	50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				30.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	-	1	30.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				30.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	-	80	30.000.000,00	80	200.000.000,00	81	200.000.000,00	82	200.000.000,00	83	200.000.000,00		
1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				50.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	78	80	50.000.000,00	80	350.000.000,00	81	350.000.000,00	82	350.000.000,00	83	350.000.000,00		
1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				50.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	-	2	50.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	-	3	50.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00		
1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	-	2	50.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				350.000.000,00		550.000.000,00		650.000.000,00		750.000.000,00		850.000.000,00		
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	78	80	350.000.000,00	80	550.000.000,00	81	650.000.000,00	82	750.000.000,00	83	850.000.000,00		
1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		
Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	-	7	100.000.000,00	8	110.000.000,00	8,80	121.000.000,00	9,68	133.100.000,00	11	146.410.000,00		
1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				20.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	-	80	20.000.000,00	80	100.000.000,00	81	100.000.000,00	82	100.000.000,00	83	100.000.000,00		
1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				30.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	-	800	30.000.000,00	3.840	200.000.000,00	3.840	200.000.000,00	3.840	200.000.000,00	3.840	200.000.000,00		
10102.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				10.000.000.000,00		10.175.000.000,00		10.092.500.000,00		10.001.750.000,00		9.901.925.000,00		
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	31.155	31.920	10.000.000.000,00	32.304	10.175.000.000,00	32.304	10.092.500.000,00	32.304	10.001.750.000,00	32.304	9.901.925.000,00		
10102.2.02.0063 - Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah				0,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		
Asrama Sekolah yang terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (Unit)	-	4	0,00	5	220.000.000,00	6	242.000.000,00	7	266.200.000,00	8	292.820.000,00		
10102.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				200.000.000,00		825.000.000,00		907.500.000,00		998.250.000,00		1098.075.000,00		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	4	200.000.000,00	4	825.000.000,00	5	907.500.000,00	5	998.250.000,00	6	1098.075.000,00		
10102.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				1000.000.000,00		1.100.000.000,00		1.210.000.000,00		1.331.000.000,00		1.464.100.000,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	-	487	1000.000.000,00	550	1.100.000.000,00	605	1.210.000.000,00	670	1.331.000.000,00	737	1.464.100.000,00		
10102.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				24.755.585.000,00		41080.000.000,00		41505.000.000,00		41605.000.000,00		41705.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	-	145	24.755.585.000,00	145	41080.000.000,00	145	41505.000.000,00	145	41605.000.000,00	145	41705.000.000,00		
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	-	5		5		5		5		5			
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	65	65		65		65		65		65			
	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	-	1081		1081		1081		1081		1081			
	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara (Unit)	-	50		50		50		50		50			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	65	65		65		65		65		65			
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	-	37		40		40		40		40			
	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	-	15.622		16.000		16.500		17.000		17.500			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	-	-		1		-		-		-			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	-	200		200		200		200		200			
	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	50	50		50		50		50		5			
	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	-	100		100		100		100		100			
	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	-	-		-		-		-		-			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	-	15.622		16.000		16.500		17.000		17.500			
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	-	1000		1000		1000		1000					
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	-	1		1		1		1					
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	-	1		1		1		1					
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	-	16.000		16.000		16.500		16.500					
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	-	1702		1750		1750		18.000					
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	-	50		60		70		80		90			
	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi (Orang)	-	60		60		60		60					
	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	420	15.622		16.000		16.500		17.000		17.500			
	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	420	433		433		435		435		440			
	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	-	1		1		1		1		1			
1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				100.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	1	1	100.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD				100.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		
Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	-	1081	100.000.000,00	1081	2.000.000.000,00	1081	2.000.000.000,00	1081	2.000.000.000,00	1081	2.000.000.000,00		
1.01.02.2.03.0008 - Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket)	-	1	0,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan Perlengkapan PAUD				100.000.000,00		1000.000.000,00		1000.000.000,00		1000.000.000,00		1000.000.000,00		
Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	-	145	100.000.000,00	145	1000.000.000,00	145	1000.000.000,00	145	1000.000.000,00	145	1000.000.000,00		
1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD				4.686.600.000,00		3.200.000.000,00		3.300.000.000,00		3.400.000.000,00		3.500.000.000,00		
Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	-	15.622	4.686.600.000,00	16.000	3.200.000.000,00	16.500	3.300.000.000,00	17.000	3.400.000.000,00	17.500	3.500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				14.042.385.000,00		15.000.000.000,00		15.000.000.000,00		15.000.000.000,00		15.000.000.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	-	1702	14.042.385.000,00	1750	15.000.000.000,00	1750	15.000.000.000,00	1750	15.000.000.000,00	18.000	15.000.000.000,00		
1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				20.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	-	50	20.000.000,00	60	150.000.000,00	70	150.000.000,00	80	150.000.000,00	90	150.000.000,00		
1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				200.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	420	433	200.000.000,00	433	500.000.000,00	435	500.000.000,00	435	500.000.000,00	440	500.000.000,00		
1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD				126.600.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	420	15.622	126.600.000,00	16.000	2.000.000.000,00	16.500	2.000.000.000,00	17.000	2.000.000.000,00	17.500	2.000.000.000,00		
1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD				20.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	50	50	20.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00		
1.01.02.2.03.0020 - Pemeliharaan Mebel Sekolah				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terpeliharanya Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara (Unit)	-	50	0,00	50	150.000.000,00	50	150.000.000,00	50	150.000.000,00	50	150.000.000,00		
1.01.02.2.03.0021 - Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi (Orang)	-	60	0,00	60	150.000.000,00	60	150.000.000,00	60	150.000.000,00	60	150.000.000,00		
1.01.02.2.03.0022 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				20.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	65	65	20.000.000,00	65	100.000.000,00	65	100.000.000,00	65	100.000.000,00	65	100.000.000,00		
1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				20.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	65	65	20.000.000,00	65	100.000.000,00	65	100.000.000,00	65	100.000.000,00	65	100.000.000,00		
1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				20.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	50	50	20.000.000,00	50	130.000.000,00	50	130.000.000,00	50	130.000.000,00	5	130.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
10102.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				20.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00		
10102.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				20.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	5	5	20.000.000,00	5	400.000.000,00	5	400.000.000,00	5	400.000.000,00	5	400.000.000,00		
10102.2.03.0028 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	-	1	0,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
10102.2.03.0029 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				20.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	-	5	20.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00		
10102.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				20.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1	1	20.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
10102.2.03.0031 - Penyediaan infrastruktur TIK				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	-	1	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
10102.2.03.0032 - Penataan Ruang/Sudut Baca				0,00		1000.000.000,00		1000.000.000,00		1000.000.000,00		1000.000.000,00		
Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	-	200	0,00	200	1000.000.000,00	200	1000.000.000,00	200	1000.000.000,00	200	1000.000.000,00		
10102.2.03.0033 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah				0,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Perpustakaan Sekolah yang terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	-	1	0,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
10102.2.03.0034 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik				20.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	-	100	20.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00		
10102.2.03.0035 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				0,00		800.000.000,00		825.000.000,00		825.000.000,00		825.000.000,00		
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	-	15.622	0,00	16.000	800.000.000,00	16.500	825.000.000,00	17.000	825.000.000,00	17.500	825.000.000,00		
10102.2.03.0036 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				0,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	-	1	0,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.2.03.0037 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				20.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1	1	20.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.02.2.03.0038 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula				0,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1	1	0,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				20.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	-	1000	20.000.000,00	1000	100.000.000,00	1000	100.000.000,00	1000	100.000.000,00	1000	100.000.000,00		
1.01.02.2.03.0040 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				100.000.000,00		4.000.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	-	-	100.000.000,00	1	4.000.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				4.500.000.000,00		4.500.000.000,00		4.800.000.000,00		4.800.000.000,00		4.800.000.000,00		
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	-	16.000	4.500.000.000,00	16.000	4.500.000.000,00	16.500	4.800.000.000,00	16.500	4.800.000.000,00	16.500	4.800.000.000,00		
1.01.02.2.03.0042 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				20.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	2	2	20.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00		
1.01.02.2.03.0043 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus				0,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	-	1	0,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
1.01.02.2.03.0044 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus				0,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	-	1	0,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				20.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	-	1	20.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD				500.000.000,00		750.000.000,00		4.750.000.000,00		4.750.000.000,00		4.750.000.000,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	-	37	500.000.000,00	40	750.000.000,00	40	4.750.000.000,00	40	4.750.000.000,00	40	4.750.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
1.01.02.2.03.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	-	1	0,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
1.01.02.2.03.0049 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				20.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	-	1	20.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
1.01.02.2.03.0050 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	-	1	0,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00		
1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				0,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	-	-	0,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				32.262.703.949,00		44.505.185.000,00		44.022.926.850,00		44.040.846.118,00		44.058.944.579,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	-	3	32.262.703.949,00	3	44.505.185.000,00	3	44.022.926.850,00	3	44.040.846.118,00	3	44.058.944.579,00		
	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi (Orang)	-	25		25		25		25		25			
	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	50	100		100		100		100		100			
	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Dibangun (Ruang)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	25	25		27		27		28		28			
	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	98	25		25		25		25		25			
	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	-	-		-		-		-		-			
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	-	-		24		24		24		24			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	-	5		5		5		5		5			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	-	-		2		2		2		2			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)	-	-		2		2		2		2			
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	-	5		5		5		5		5			
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	-	5		5		5		5		5			
	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	-	35		35		35		35		35			
	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	-	100		100		100		100		100			
	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	-	5.900		5.900		5.900		5.900		5.900			
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	-	55		55		55		55		55			
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	3	1.500		2.000		2.500		3.000		3.500			
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	2.700	105		220		220		220		220			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	-	2.080		2.080		2.080		2.080		2.080			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	2.586	40		40			40			40			
	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi (Orang)	-	50		50			50			50			
	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	-	5		5			5			5			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	-	30		30			30			30			
	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	2.365	-		100			100			100			
	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	-	30		30			30			30			
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	-	35		35			35			35			
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	-	2		2			2			2			
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	-	1		1			1			1			
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	-	1		1			1			1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	15	1		1			1			1			
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	-	-		200			200			200			
	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	-	1		1			1			1			
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	-	5		5			5			5			
1.01.02.2.04.00.10 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan				3.000.000.000,00		3.500.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		
Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	-	5.900	3.000.000.000,00	5.900	3.500.000.000,00	5.900	3.000.000.000,00	5.900	3.000.000.000,00	5.900	3.000.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				23.523.003.949,00		22.385.500.000,00		22.385.500.000,00		22.385.500.000,00		22.385.500.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	-	2.080	23.523.003.949,00	2.080	22.385.500.000,00	2.080	22.385.500.000,00	2.080	22.385.500.000,00	2.080	22.385.500.000,00		
1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				20.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	2.586	40	20.000.000,00	40	150.000.000,00	40	150.000.000,00	40	150.000.000,00	40	150.000.000,00		
1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan				20.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	98	25	20.000.000,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00		
1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				1.689.700.000,00		1.774.185.000,00		1.791.926.850,00		1.809.846.118,00		1.827.944.579,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	25	25	1.689.700.000,00	27	1.774.185.000,00	27	1.791.926.850,00	28	1.809.846.118,00	28	1.827.944.579,00		
1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				50.000.000,00		275.500.000,00		275.500.000,00		275.500.000,00		275.500.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	50	100	50.000.000,00	100	275.500.000,00	100	275.500.000,00	100	275.500.000,00	100	275.500.000,00		
1.01.02.2.04.0021 - Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	-	30	0,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00		
1.01.02.2.04.0023 - Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi (Orang)	-	50	0,00	50	150.000.000,00	50	150.000.000,00	50	150.000.000,00	50	150.000.000,00		
1.01.02.2.04.0024 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				20.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	-	30	20.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00		
1.01.02.2.04.0025 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				20.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	-	35	20.000.000,00	35	50.000.000,00	35	50.000.000,00	35	50.000.000,00	35	50.000.000,00		
10102.2.04.0026 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				20.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	-	35	20.000.000,00	35	50.000.000,00	35	50.000.000,00	35	50.000.000,00	35	50.000.000,00		
10102.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				20.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	15	1	20.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
10102.2.04.0028 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				20.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	-	1	20.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
10102.2.04.0030 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				20.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	-	2	20.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
10102.2.04.0031- Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				20.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	-	1	20.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
10102.2.04.0032 - Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi (Orang)	-	25	20.000.000,00	25	20.000.000,00	25	20.000.000,00	25	20.000.000,00	25	20.000.000,00		
10102.2.04.0033 - Penyediaan infrastruktur TIK				0,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	-	5	0,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00		
10102.2.04.0034 - Penataan Ruang/Sudut Baca				0,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	-	5	0,00	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00		
10102.2.04.0035 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik				20.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	-	100	20.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
10102.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				20.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	2.700	105	20.000.000,00	220	2.000.000.000,00	220	2.000.000.000,00	220	2.000.000.000,00	220	2.000.000.000,00		
10102.2.04.0037 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	-	-	0,00	200	30.000.000,00	200	30.000.000,00	200	30.000.000,00	200	30.000.000,00		
10102.2.04.0038 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				20.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	-	1	20.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
10102.2.04.0039 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				20.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	-	3	20.000.000,00	3	600.000.000,00	3	600.000.000,00	3	600.000.000,00	3	600.000.000,00		
10102.2.04.0040 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah				3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	3	1500	3.000.000.000,00	2.000	3.000.000.000,00	2.500	3.000.000.000,00	3.000	3.000.000.000,00	3.500	3.000.000.000,00		
10102.2.04.0041- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				100.000.000,00		1000.000.000,00		1000.000.000,00		1000.000.000,00		1000.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	-	5	100.000.000,00	5	1000.000.000,00	5	1000.000.000,00	5	1000.000.000,00	5	1000.000.000,00		
10102.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				20.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	-	55	20.000.000,00	55	100.000.000,00	55	100.000.000,00	55	100.000.000,00	55	100.000.000,00		
10102.2.04.0043 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium				0,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	-	-	0,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
10102.2.04.0044 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
10102.2.04.0045 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	-	1	0,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
10102.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				0,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	-	-	0,00	24	600.000.000,00	24	600.000.000,00	24	600.000.000,00	24	600.000.000,00		
10102.2.04.0047 - Pembangunan Ruang Laboratorium				0,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	-	-	0,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00		
10102.2.04.0048 - Pengadaan Mebel Sekolah				0,00		1000.000.000,00		1000.000.000,00		1000.000.000,00		1000.000.000,00		
Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	2.365	-	0,00	100	1000.000.000,00	100	1000.000.000,00	100	1000.000.000,00	100	1000.000.000,00		
10102.2.04.0049 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	-	-	0,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00		
10102.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal				0,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)	-	-	0,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00		
10102.2.04.0053 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus				0,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	-	-	0,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
10102.2.04.0054 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus				0,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	-	-	0,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
10102.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan				500.000.000,00		1500.000.000,00		1500.000.000,00		1500.000.000,00		1500.000.000,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	-	5	500.000.000,00	5	1500.000.000,00	5	1500.000.000,00	5	1500.000.000,00	5	1500.000.000,00		
10102.2.04.0056 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0,00		1250.000.000,00		1250.000.000,00		1250.000.000,00		1250.000.000,00		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	-	5	0,00	5	1250.000.000,00	5	1250.000.000,00	5	1250.000.000,00	5	1250.000.000,00		
10102.2.04.0057 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	-	1	0,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
10102.2.04.0058 - Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat				0,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Taman Bacaan Masyarakat yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	-	1	0,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
10102.2.04.0059 - Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat				0,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Taman Bacaan Masyarakat yang Terbangun	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Dibangun (Ruang)	-	1	0,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.2.04.0060 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	-	1	0,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
1.01.02.2.04.0061- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				100.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2	1	100.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				0,00		1340.000.000,00		1.160.000.000,00		1020.000.000,00		1050.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	100	100	0,00	100	1340.000.000,00	100	1.160.000.000,00	100	1020.000.000,00	100	1050.000.000,00	1012.22.0.00.010000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.03.2.01- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				0,00		820.000.000,00		520.000.000,00		540.000.000,00		570.000.000,00		
Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	-	9	0,00	9	820.000.000,00	9	520.000.000,00	9	540.000.000,00	9	570.000.000,00		
	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	-	100		100		100		100		100			
1.01.03.2.010002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar				0,00		420.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		
Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	-	100	0,00	100	420.000.000,00	100	420.000.000,00	100	420.000.000,00	100	420.000.000,00		
1.01.03.2.010007 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar				0,00		400.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00		
Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	-	9	0,00	9	400.000.000,00	9	100.000.000,00	9	120.000.000,00	9	150.000.000,00		
1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				0,00		520.000.000,00		640.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00		
Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	100	100	0,00	100	520.000.000,00	100	640.000.000,00	100	480.000.000,00	100	480.000.000,00		
	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun (Dokumen)	-	16		16		20		22		26			
	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	-	16		16		20		22		26			
	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku)	-	16		16		20		22		26			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai (Buku)	-	16		16		20		22		26			
1.01.03.2.02.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				0,00		260.000.000,00		320.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		
Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	100	100	0,00	100	260.000.000,00	100	320.000.000,00	100	160.000.000,00	100	160.000.000,00		
1.01.03.2.02.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku)	-	16	0,00	16	200.000.000,00	20	200.000.000,00	22	200.000.000,00	26	200.000.000,00		
1.01.03.2.02.0004 - Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				0,00		20.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai/ditelaah (Buku)	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai (Buku)	-	16	0,00	16	20.000.000,00	20	40.000.000,00	22	40.000.000,00	26	40.000.000,00		
1.01.03.2.02.0005 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				0,00		20.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun (Dokumen)	-	16	0,00	16	20.000.000,00	20	40.000.000,00	22	40.000.000,00	26	40.000.000,00		
1.01.03.2.02.0006 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				0,00		20.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	-	16	0,00	16	20.000.000,00	20	40.000.000,00	22	40.000.000,00	26	40.000.000,00		
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				800.000.000,00		1200.000.000,00		1200.000.000,00		1200.000.000,00		1200.000.000,00		
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	92	95	800.000.000,00	96	1200.000.000,00	100	1200.000.000,00	100	1200.000.000,00	100	1200.000.000,00	1012.22.0.00.010000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.04.2.01- Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				800.000.000,00		1200.000.000,00		1200.000.000,00		1200.000.000,00		1200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1	1	800.000.000,00	1	1200.000.000,00	1	1200.000.000,00	1	1200.000.000,00	1	1200.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	12	7		7		7		7		7			
1.01.04.2.010001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan				700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan (Dokumen)	12	7	700.000.000,00	7	700.000.000,00	7	700.000.000,00	7	700.000.000,00	7	700.000.000,00		
1.01.04.2.010002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan				100.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan (Laporan)	1	1	100.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				160.076.000,00		370.000.000,00		370.000.000,00		395.000.000,00		420.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	0	0	160.076.000,00	0	370.000.000,00	0	370.000.000,00	0	395.000.000,00	0	420.000.000,00	1012.22.0.00.010000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.05.2.01- Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				40.076.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	3	5	40.076.000,00	7	250.000.000,00	9	250.000.000,00	11	275.000.000,00	13	300.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	112	114		116				118		120			
1.01.05.2.010001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.038.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	3	5	20.038.000,00	7	125.000.000,00	9	125.000.000,00	11	125.000.000,00	13	125.000.000,00		
1.01.05.2.01.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.038.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	112	114	20.038.000,00	116	125.000.000,00		125.000.000,00	118	150.000.000,00	120	175.000.000,00		
1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Terlaksananya Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)		437	120.000.000,00	440	120.000.000,00	443	120.000.000,00	446	120.000.000,00	449	120.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)		437		440				443					445
1.01.05.2.02.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)		437	70.000.000,00	440	70.000.000,00	443	70.000.000,00	445	70.000.000,00	448	70.000.000,00		
1.01.05.2.02.0003 - Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)		437	50.000.000,00	440	50.000.000,00	443	50.000.000,00	446	50.000.000,00	449	50.000.000,00		
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				2.249.775.000,00		6.176.500.000,00		6.804.162.500,00		7.525.169.375,00		8.075.516.781,00		
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				892.000.000,00		3.544.750.000,00		3.957.912.500,00		4.442.969.375,00		4.733.771.781,00		
Meningkatnya Warisan Budaya Kota Balikpapan yang Ditetapkan	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Pencatatan (%)	-	50	892.000.000,00	50	3.544.750.000,00	66,67	3.957.912.500,00	66,67	4.442.969.375,00	75	4.733.771.781,00	1012.22.0.00.010000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2.22.02.2.01- Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				355.000.000,00		1.193.500.000,00		1.371.537.500,00		1.597.956.875,00		1.604.258.031,00		
Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina (Orang)	40	65	355.000.000,00	70	1.193.500.000,00	75	1.371.537.500,00	80	1.597.956.875,00	85	1.604.258.031,00		
	Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina (Lembaga)	0	10		12				14					16

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	3	3		3		3		4		4			
	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
2.22.02.2.010001- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				20.000.000,00		935.000.000,00		1028.500.000,00		1.131.350.000,00		1244.485.000,00		
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	3	3	20.000.000,00	3	935.000.000,00	3	1028.500.000,00	4	1.131.350.000,00	4	1244.485.000,00		
2.22.02.2.010003 - Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota				185.000.000,00		35.000.000,00		90.000.000,00		180.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	0	1	185.000.000,00	1	35.000.000,00	1	90.000.000,00	1	180.000.000,00	1	35.000.000,00		
2.22.02.2.010004 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan				90.000.000,00		143.750.000,00		165.312.500,00		190.109.375,00		218.625.781,00		
Terlaksananya pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina (Orang)	40	65	90.000.000,00	70	143.750.000,00	75	165.312.500,00	80	190.109.375,00	85	218.625.781,00		
2.22.02.2.010005 - Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan				60.000.000,00		79.750.000,00		87.725.000,00		96.497.500,00		106.147.250,00		
Terlaksananya Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina (Lembaga)	0	10	60.000.000,00	12	79.750.000,00	14	87.725.000,00	16	96.497.500,00	18	106.147.250,00		
2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				537.000.000,00		2.351.250.000,00		2.586.375.000,00		2.845.012.500,00		3.129.513.750,00		
Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	3	3	537.000.000,00	3	2.351.250.000,00	3	2.586.375.000,00	3	2.845.012.500,00	3	3.129.513.750,00		
	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	0	6		7		8		9		10			
2.22.02.2.02.0001- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				500.000.000,00		2.035.000.000,00		2.238.500.000,00		2.462.350.000,00		2.708.585.000,00		
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	3	3	500.000.000,00	3	2.035.000.000,00	3	2.238.500.000,00	3	2.462.350.000,00	3	2.708.585.000,00		
2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				20.000.000,00		79.750.000,00		87.725.000,00		96.497.500,00		106.147.250,00		
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	0	2	20.000.000,00	2	79.750.000,00	2	87.725.000,00	2	96.497.500,00	2	106.147.250,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22.02.2.02.0003 - Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan				17.000.000,00		236.500.000,00		260.150.000,00		286.165.000,00		314.781.500,00		
Tersedianya Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	0	6	17.000.000,00	7	236.500.000,00	8	260.150.000,00	9	286.165.000,00	10	314.781.500,00		
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				390.000.000,00		607.750.000,00		619.850.000,00		633.160.000,00		647.801.000,00		
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Penduduk Usia 10 tahun ke atas yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/ Pendukung Pertunjukan Seni Dalam 3 Bulan Terakhir (%)	2,54	2,7	390.000.000,00	2,78	607.750.000,00	2,86	619.850.000,00	2,94	633.160.000,00	3,02	647.801.000,00	1012.22.0.00.010000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				390.000.000,00		607.750.000,00		619.850.000,00		633.160.000,00		647.801.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Pengantunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	0	2	390.000.000,00	4	607.750.000,00	6	619.850.000,00	8	633.160.000,00	10	647.801.000,00		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	110	135		160		185		210		235			
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	5	15		25		35		45		55			
2.22.03.2.010001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional				350.000.000,00		348.700.000,00		348.700.000,00		348.700.000,00		348.700.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	110	135	350.000.000,00	160	348.700.000,00	185	348.700.000,00	210	348.700.000,00	235	348.700.000,00		
2.22.03.2.010002 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan				20.000.000,00		138.050.000,00		138.050.000,00		138.050.000,00		138.050.000,00		
Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	5	15	20.000.000,00	25	138.050.000,00	35	138.050.000,00	45	138.050.000,00	55	138.050.000,00		
2.22.03.2.010003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				20.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		161.051.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	0	2	20.000.000,00	4	121.000.000,00	6	133.100.000,00	8	146.410.000,00	10	161.051.000,00		
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				20.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		219.615.000,00		241.576.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun keatas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah/Warisan Dunia Dalam Setahun Terakhir (%)	0,25	0,43	20.000.000,00	0,57	181500.000,00	0,76	199.650.000,00	1	219.615.000,00	133	241576.500,00	1012.22.0.00.010000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
2.22.04.2.01- Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000,00		181500.000,00		199.650.000,00		219.615.000,00		241576.500,00				
Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	20	40	20.000.000,00	45	181500.000,00	50	199.650.000,00	55	219.615.000,00	60	241576.500,00				
2.22.04.2.010001- Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota				20.000.000,00		181500.000,00		199.650.000,00		219.615.000,00		241576.500,00				
Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	20	40	20.000.000,00	45	181500.000,00	50	199.650.000,00	55	219.615.000,00	60	241576.500,00				
2.22.05- PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				947.775.000,00		1842.500.000,00		2.026.750.000,00		2.229.425.000,00		2.452.367.500,00				
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Terhadap Total Pendaftaran (%)	22,56	24,82	947.775.000,00	25,90	1842.500.000,00	26,95	2.026.750.000,00	27,97	2.229.425.000,00	28,97	2.452.367.500,00	1012.22.0.00.010000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
2.22.05.2.01- Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				37.775.000,00		275.000.000,00		302.500.000,00		332.750.000,00		366.025.000,00				
Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	6	34	37.775.000,00	36	275.000.000,00	38	302.500.000,00	40	332.750.000,00	42	366.025.000,00				
	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	5	133		137				139					141		143
2.22.05.2.010001- Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya				17.775.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00				
Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	5	133	17.775.000,00	137	110.000.000,00	139	121.000.000,00	141	133.100.000,00	143	146.410.000,00				
2.22.05.2.010002 - Penetapan Cagar Budaya				20.000.000,00		165.000.000,00		181500.000,00		199.650.000,00		219.615.000,00				
Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	6	34	20.000.000,00	36	165.000.000,00	38	181500.000,00	40	199.650.000,00	42	219.615.000,00				
2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				910.000.000,00		1567.500.000,00		1.724.250.000,00		1896.675.000,00		2.086.342.500,00				
Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi (Objek)	0	3	910.000.000,00	6	1567.500.000,00	9	1.724.250.000,00	12	1896.675.000,00	15	2.086.342.500,00				
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	10	15		20				25				30		35	
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	0	5		10				15				20		25	
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	132	134		136				138				140		142	
2.22.05.2.02.0001- Pelindungan Cagar Budaya				850.000.000,00		935.000.000,00		1028.500.000,00		1131.350.000,00		1244.485.000,00				
Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	132	134	850.000.000,00	136	935.000.000,00	138	1028.500.000,00	140	1131.350.000,00	142	1244.485.000,00				
2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya				20.000.000,00		192.500.000,00		211.750.000,00		232.925.000,00		256.217.500,00				
Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	0	5	20.000.000,00	10	192.500.000,00	15	211.750.000,00	20	232.925.000,00	25	256.217.500,00				
2.22.05.2.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya				20.000.000,00		275.000.000,00		302.500.000,00		332.750.000,00		366.025.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	10	15	20.000.000,00	20	275.000.000,00	25	302.500.000,00	30	332.750.000,00	35	366.025.000,00		
2.22.05.2.02.0004 - Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan				20.000.000,00		165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		219.615.000,00		
Terlaksananya Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi (Objek)	0	3	20.000.000,00	6	165.000.000,00	9	181.500.000,00	12	199.650.000,00	15	219.615.000,00		

Penjabaran tabel di atas dapat pula diakses melalui website SIPD:  
<https://sipd.kemendagri.go.id/landing>  
(Pada Menu Renstra PD – Sub Menu Laporan)



**4.3 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Dalam dokumen RPJMD Kota Balikpapan tahun 2025-2029 telah ditetapkan Program Prioritas Pembangunan Daerah yang merupakan program strategis yang memiliki aspek politik dan teknokratik. Pelaksanaan program ini harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah guna mendukung visi dan misi kepala daerah.

Dalam dimensi politik, program prioritas mencakup program unggulan yang sejalan dengan visi dan misi Walikota serta Wakil Walikota terpilih. Berbagai program tersebut merupakan bagian dari janji politik yang harus direalisasikan melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang integrasi ke dalam dokumen perencanaan. Sementara itu, dalam dimensi teknokratik, program prioritas disusun berdasarkan analisis terhadap isu serta permasalahan yang dihadapi daerah. Terdapat 9 (sembilan) program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2025-2030. Kesembilan program unggulan tersebut menekankan pada upaya percepatan pembangunan di sektor sumber daya manusia, ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola sebagai sebuah investasi untuk mewujudkan “Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman”. Program prioritas tersebut yaitu:

- 1. Transformasi Birokrasi
- 2. Peningkatan Layanan Kesehatan dan Pendidikan
- 3. Pengentasan Stunting
- 4. Penyediaan Air Bersih
- 5. Pengendalian Banjir
- 6. Pengembangan Kota MICE dan Wisata
- 7. Pengembangan Kota Inovatif
- 8. Kota Ramah Anak
- 9. Perlindungan Lingkungan Hidup

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, khususnya Peningkatan Layanan Kesehatan dan Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menetapkan berbagai program prioritas yang dirancang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis, tetapi juga sebagai pengungkit dalam memastikan keselarasan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, provinsi, maupun kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan program prioritas selanjutnya diturunkan ke dalam berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan sasaran perangkat daerah. Setiap sub kegiatan dirancang untuk mendukung pencapaian target yang terukur, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan efektivitas program prioritas yang dijalankan. Adapun kegiatan/subkegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
1.	1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan	1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
2.	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Partisipasi dan/atau kemampuan Peserta Didik yang menjadi kewenangan pemerintah kota	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
			1.01.02.2.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			1.01.02.2.01.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
			1.01.02.2.01.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
			1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.2.01.0009 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			1.01.02.2.01.0010 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
			1.01.02.2.01.0011 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
			1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah	
			1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
			1.01.02.2.01.0019 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
			1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
			1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0032 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0033 - Pemeliharaan Mebel Sekolah	
			1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
			1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.01.0041 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			1.01.02.2.01.0042 - Penyediaan infrastruktur TIK	
			1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
			1.01.02.2.01.0045 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
			1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
			1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
			1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
			1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
			1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
			1.01.02.2.02.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
			1.01.02.2.02.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
			1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium	
			1.01.02.2.02.0007 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	
			1.01.02.2.02.0008 - Pembangunan Asrama Sekolah	
			1.01.02.2.02.0010 - Pembangunan Fasilitas Parkir	
			1.01.02.2.02.0011 - Pembangunan Kantin Sekolah	
			1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.01.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
			1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
			1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	
			1.01.02.2.02.0019 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	
			1.01.02.2.02.0022 - Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	
			1.01.02.2.02.0023 - Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	
			1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah	
			1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
			1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
			1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
			1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
			1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
			1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
			1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
			1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
			1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
			1.01.02.2.02.0063 - Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	
			1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
			1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
			1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
			1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD	
			1.01.02.2.03.0008 - Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	
			1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan Perlengkapan PAUD	
			1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	
			1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	
			1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
			1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
			1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	
			1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	
			1.01.02.2.03.0020 - Pemeliharaan Mebel Sekolah	
			1.01.02.2.03.0021 - Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
			1.01.02.2.03.0022 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
			1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
			1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.03.0028 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			1.01.02.2.03.0029 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Tenaga Kependidikan	
			1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
			1.01.02.2.03.0031 - Penyediaan infrastruktur TIK	
			1.01.02.2.03.0032 - Penataan Ruang/Sudut Baca	
			1.01.02.2.03.0033 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
			1.01.02.2.03.0034 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	
			1.01.02.2.03.0035 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
			1.01.02.2.03.0036 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
			1.01.02.2.03.0037 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
			1.01.02.2.03.0038 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	
			1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.03.0040 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
			1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
			1.01.02.2.03.0042 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.2.03.0043 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	
			1.01.02.2.03.0044 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	
			1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
			1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	
			1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	
			1.01.02.2.03.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
			1.01.02.2.03.0049 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			1.01.02.2.03.0050 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
			1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0021 - Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0023 - Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0024 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
			1.01.02.2.04.0025 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
			1.01.02.2.04.0026 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.04.0028 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.04.0030 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			1.01.02.2.04.0031 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
			1.01.02.2.04.0032 - Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0033 - Penyediaan infrastruktur TIK	
			1.01.02.2.04.0034 - Penataan Ruang/Sudut Baca	
			1.01.02.2.04.0035 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	
			1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
			1.01.02.2.04.0037 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
			1.01.02.2.04.0038 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			1.01.02.2.04.0039 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
			1.01.02.2.04.0040 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
			1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.04.0045 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	
			1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
			1.01.02.2.04.0047 - Pembangunan Ruang Laboratorium	
			1.01.02.2.04.0048 - Pengadaan Mebel Sekolah	
			1.01.02.2.04.0049 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	
			1.01.02.2.04.0053 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	
			1.01.02.2.04.0054 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	
			1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0056 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
			1.01.02.2.04.0057 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
			1.01.02.2.04.0058 - Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat	
			1.01.02.2.04.0059 - Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat	
			1.01.02.2.04.0060 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			1.01.02.2.04.0061 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
3.	1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya Kualitas Kurikulum Muatan Lokal	1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
			1.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
			1.01.03.2.01.0007 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
			1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
			1.01.03.2.02.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
			1.01.03.2.02.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
			1.01.03.2.02.0004 - Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
			1.01.03.2.02.0005 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.01.03.2.02.0006 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
4.	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
5.	1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	1.01.05.2.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
			1.01.05.2.01.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
			1.01.05.2.01.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
			1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
			1.01.05.2.02.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
			1.01.05.2.02.0003 - Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
6.	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya Warisan Budaya Kota Balikpapan yang Ditetapkan	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
			2.22.02.2.01.0003 - Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	
			2.22.02.2.01.0004 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan	
			2.22.02.2.01.0005 - Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	
			2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
			2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	
			2.22.02.2.02.0003 - Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	
7.	2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	
			2.22.03.2.01.0002 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	
			2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	
8.	2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.22.04.2.01.0001 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	
9.	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
			2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	
			2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya	
			2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
			2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya	
			2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya	
			2.22.05.2.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya	
			2.22.05.2.02.0004 - Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	

**4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu perangkat daerah atas pencapaian tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN									
1.	Rapor pendidikan	Angka	74,94	79,4	80	81	82	83	84	Indikator Tujuan PD
2.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	-	-	48	49	50	51	52	Indikator Tujuan PD
3.	Rata -rata persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi dan numerasi pendidikan dasar dan kesetaraan	%	78,48	79,51	80,29	81,07	81,83	82,61	83,39	Indikator Sasaran PD
4.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,37	68,04	72,37	74,37	76,37	78,37	80,37	Indikator Sasaran PD
5.	Indeks Dimensi Warisan Budaya	Indeks	-	11,33	24,46	24,77	29,25	29,57	31,99	Indikator Sasaran PD
6.	Indeks Dimensi Ekspresi Budaya	Indeks	-	1,27	26,86	27,31	27,73	28,14	28,49	Indikator Sasaran PD
7.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,25	14,35	14,40	14,50	14,59	14,68	14,78	Indikator Sasaran PD, IUP RPJPD 2025-2045
8.	Indeks Dimensi Pendidikan	Indeks	-	-	15,6	16,7	17,8	18,9	20,0	Indikator Sasaran PD
9.	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	10,99	11,10	11,20	11,30	11,40	11,50	11,60	Indikator Sasaran PD, IUP RPJPD 2025-2045

Keterangan:

PD = Perangkat Daerah

IUP RPJPD = Indikator Utama Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan tahun 2025-2045

4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator keberhasilan kinerja yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan. Penentuan target penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana Tabel 4.5, adapun definisi operasional dan formulasi perhitungan dari masing-masing indikator sebagaimana terlampir dalam Renstra.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.	Rapor pendidikan	positif	Angka	74,94	79,4	80	81	82	83	84	
2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	positif	Nilai	70,37	68,04	72,37	74,37	76,37	78,37	80,37	
3.	Rata -rata persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi dan numerasi pendidikan dasar dan kesetaraan	positif	%	78,48	79,51	80,29	81,07	81,83	82,61	83,39	
4.	Harapan Lama Sekolah	positif	Tahun	14,25	14,35	14,40	14,50	14,59	14,68	14,78	
5.	Rata - Rata Lama Sekolah	positif	Tahun	10,99	11,10	11,20	11,30	11,40	11,50	11,60	
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	positif	Indeks	-	87,07	88,18	89,18	89,39	89,59	89,80	
7.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	positif	%	99,81	99,93	99,94	99,95	99,96	99,97	99,98	
8.	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	positif	Persentase	92	93	95	96	100	100	100	
9.	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
10.	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Kesetaraan	positif	%	64,98	67,18	69,38	71,58	73,78	75,98	78,18	
11.	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	positif	Persentase	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	positif	%	99,26	99,88	99,89	99,91	99,93	99,95	99,97	
13.	Idlim Keamanan SMP	positif	%	67,31	64,59	66,59	68,59	70,59	72,59	74,59	
14.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	positif	%	50,01	53,27	55,27	57,27	59,27	62,27	65,27	
15.	Idlim Keamanan Kesetaraan	positif	%	67,31	64,59	66,59	68,59	70,59	72,59	74,59	
16.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	positif	%	54,44	54,67	55,67	56,67	57,67	58,67	59,67	
17.	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca SD/Sederajat	positif	%	65,56	67,71	68,33	68,94	69,56	70,17	70,79	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
18.	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SD/Sederajat	positif	%	78,31	78,62	78,93	79,25	79,56	79,87	80,18	
19.	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca SMP/Sederajat	positif	%	81,82	81,96	82,11	82,25	82,39	82,54	82,68	
20.	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SMP/Sederajat	positif	%	88,26	88,43	88,60	88,78	88,95	89,12	89,29	
21.	Iklim Keamanan PAUD	positif	%	73,21	74,59	75,59	76,59	77,59	78,59	79,59	
22.	Iklim Keamanan SD	positif	%	73,37	75,23	75,33	75,43	75,53	75,63	75,73	
23.	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi Kesetaraan	positif	%	61,99	63,19	64,39	65,59	66,79	67,99	69,19	
24.	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat: (a) perempuan/laki-laki	positif	%	109,05	105,01	106,13	107,25	108,37	109,49	109,55	
25.	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	positif	Persentase	99,65	99,66	99,67	99,68	99,69	99,70	99,71	
26.	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.	positif	Persentase	95,5	96,5	97,5	98,5	99	99,5	100	
27.	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
28.	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat: (a) perempuan/laki-laki	positif	%	99,02	98,23	98,43	98,63	98,83	99,03	99,04	
29.	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	positif	(%)	70,96	72,96	74,96	76,96	78,96	80,96	82,96	
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
30.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		Indeks	-	-	48	49	50	51	52	
31.	Indeks Dimensi Warisan Budaya	positif	Indeks	-	1,33	24,46	24,77	29,25	29,57	31,99	
32.	Indeks Dimensi Ekspresi Budaya	positif	Indeks	-	1,27	26,86	27,31	27,73	28,14	28,49	
33.	Indeks Dimensi Pendidikan	positif	Indeks	-	-	15,6	16,7	17,8	18,9	20,0	
34.	Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Terhadap Total Pendaftaran	positif	%	22,56	23,70	24,82	25,90	26,95	27,97	28,97	
35.	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun keatas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah/Warisan Dunia Dalam Setahun Terakhir	positif	%	0,25	0,33	0,43	0,57	0,76	1	1,33	
36.	Persentase Penduduk Usia 10 tahun ke atas yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/Pendukung Pertunjukan Seni Dalam 3 Bulan Terakhir	positif	%	2,54	2,62	2,7	2,78	2,86	2,94	3,02	
37.	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Pencatatan	positif	%	-	-	50	50	66,67	66,67	75	
38.	Terlestarikannya cagar budaya	positif	%	-	-	48	49	50	51	52	

4.6 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Indikator Kinerja Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan beserta definisi operasional dan formulasi perhitungan dari masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI HITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN												
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI											
1	Rapor pendidikan	Angka	rapor pendidikan sebagai nilai atau skor yang tercantum pada platform Rapor Pendidikan versi Kemendikbudristek tahun 2024, yang mencakup indikator literasi, numerasi, karakter, dan iklim pembelajaran, dan digunakan sebagai variabel untuk mengukur kualitas pendidikan di satuan pendidikan dasar	Berdasarkan rilis rapor pendidikan hasil asesmen nasional	74,94	79,4	80	81	82	83	84	Indikator Tujuan PD
2	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	Indeks Pembangunan Kebudayaan Lokal (IPK Lokal) diperoleh dari pengukuran 7	$IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j \times indeks D_j)$	-	-	48	49	50	51	52	Indikator Tujuan PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI HITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dimensi pembangunan kebudayaan pada tingkat kabupaten/kota meliputi Dimensi Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, Gender, dan Warisan Budaya	<div>Keterangan: IK = Indeks Pembangunan Kebudayaan Wj = Bobot dimensi ke- j Dj = Dimensi ke- j  Rumus menghitung indeks dimensi (Dj):  <math display="block">Indeks\ D_j = \left( \frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100</math>  Dj = Dimensi ke- j SXji = Nilai indikator i pada dimensi ke-j yang udah dinormalisasi nj = Jumlah indikator dimensi ke-j</div>								

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI HITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai AKIP Perangkat Daerah sebagai skor yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tingkat perangkat daerah, yang mencakup aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan kualitas	Diperoleh dari evaluasi internal yang dilakukan oleh inspektorat daerah (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Nilai akuntabilitas kinerja berdasarkan Evaluasi AKIP = Nilai komponen perencanaan kinerja+ Nilai komponen pengukuran kinerja+ Nilai Komponen Pelaporan Kinerja+ Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	70,37	68,04	72,37	74,37	76,37	78,37	80,37	Indikator Sasaran PD





NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI HITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Rata-rata persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi dan numerasi pendidikan dasar dan kesetaraan	%	Ukuran yang menunjukkan proporsi siswa pada jenjang pendidikan dasar dan kesetaraan (misalnya SD/MI, Paket A, SMP/MTs, Paket B) yang mampu mencapai atau melampaui tingkat kemampuan minimum yang ditetapkan pada asesmen tingkat nasional, khususnya dalam literasi dan numerasi. Indikator ini menggabungkan dua bagian penting yaituPersentase siswa yang mencapai SKM Literasi dan Persentase siswa yang mencapai SKM Numerasi	(Persentase standar kompetensi minimum Literasi+Persentase standar kompetensi minimum Numerasi) dibagi 2	78,48	79,51	80,29	81,07	81,83	82,61	83,39	Indikator Sasaran PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI HITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	Indeks Dimensi Warisan Budaya	Indeks	Indeks Dimensi Warisan Budaya menggambarkan upaya yang dilakukan seluruh pihak (masyarakat dan pemerintah) terhadap pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, yang mana dapat berkontribusi terhadap pencapaian Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indikator perhitungan Dimensi Warisan Budaya: 1. Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran. 2. Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan. 3. Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari 4. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni dalam 3 bulan terakhir. 5. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/ warisan dunia dalam setahun terakhir. 6. Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional dalam 3 bulan terakhir.	-	11,33	24,46	24,77	29,25	29,57	31,99	Indikator Sasaran PD



NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI HITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	Indeks Dimensi Ekspresi Budaya	Indeks	Indeks Dimensi Ekspresi Budaya didefinisikan sebagai skor yang diperoleh dari pengukuran indikator aktivitas budaya, partisipasi masyarakat, dan akses terhadap media ekspresi budaya di tingkat kabupaten/kota; yang mana dapat berkontribusi terhadap pencapaian Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks Dimensi Ekspresi Budaya diukur melalui indikator: a) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir b) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi c) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni d) Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	-	1,27	26,86	27,31	27,73	28,14	28,49	Indikator Sasaran PD
8	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pendidikan, yang mana	Hitungan Rata-Rata Lama Sekolah mengacu pada data rilis Badan Pusat Statistik (BPS)	10,99	11,10	11,20	11,30	11,40	11,50	11,60	- Indikator Sasaran PD - IUP RPJPD 2025-2045

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI HITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Pengukuran rata-rata lama sekolah tidak memperhitungkan tahun yang dihabiskan penduduk untuk mengulang karena tidak naik kelas. Secara umum, nilai indikator ini menunjukkan tingkat keterampilan dan kompetensi penduduk suatu wilayah, yang dapat dilihat sebagai proksi dari aspek kuantitatif dan kualitatif dari stok sumber daya manusia. Nilai yang relatif tinggi menunjukkan semakin tinggi capaian jenjang pendidikan yang	<div><math display="block">RLS = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times L_i)}{\sum_{i=1}^n P_i}</math></div> <div>Pi = jumlah penduduk umur 25+ menurut kelompok tertinggi pendidikan yang ditamatkan Li = konversi lama sekolah (dalam tahun) untuk setiap tingkat pendidikan n = jumlah kategori tingkat pendidikan</div>								



NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI HITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9	Indeks Dimensi Pendidikan	Indeks	Indeks Dimensi Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang inklusif agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam bidang Seni, Budaya, dan Bahasa; yang mana dapat berkontribusi terhadap pencapaian Indeks Pembangunan Kebudayaan	Dimensi Pendidikan diukur melalui indikator: a) Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas b) arapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas c) Angka Kesiapan Sekolah d) Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekstrakurikuler kesenian e) Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah f) Persentase penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang bersekolah	-	-	15,6	16,7	17,8	18,9	20,0	Indikator Sasaran PD



[illegible]

[illegible]

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI HITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
13	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Kesetaraan	%	Ukuran proporsi siswa pada pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, atau Paket C—sesuai jenjang dasar/menengah yang dinilai) yang mampu mencapai atau melampaui Standar Kompetensi Minimum pada asesmen tingkat nasional, khususnya Literasi	(Jumlah siswa yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi dibagi dengan Total siswa peserta asesmen) dikali 100%	64,98	67,18	69,38	71,58	73,78	75,98	78,18	Indikator Program

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI HITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
14	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun keatas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah/Warisan Dunia Dalam Setahun Terakhir	%	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah adalah proporsi penduduk yang berusia 10 tahun ke atas yang telah mengunjungi satu atau lebih peninggalan sejarah dalam periode waktu tertentu (satu tahun). Untuk mengukur ini secara praktis, perlu ditentukan populasi target: Jumlah total penduduk berusia 10 tahun ke atas dalam area atau kelompok yang dianalisis. Mengumpulkan data: Jumlah orang dalam kelompok usia tersebut yang telah mengunjungi peninggalan sejarah dalam periode waktu yang ditentukan.	Persentase = (Jumlah Penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia dibagi dengan Jumlah total penduduk usia 10 tahun ke atas) dikali 100%	0,25	0,33	0,43	0,57	0,76	1	1,33	Indikator Program

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI HITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
15	Persentase Penduduk Usia 10 tahun ke atas yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/Pendukung Pertunjukan Seni Dalam 3 Bulan Terakhir	%	Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni: Jumlah orang yang secara aktif berpartisipasi dalam pertunjukan seni, baik sebagai pelaku (misalnya, pemain, penyanyi) atau sebagai pendukung (misalnya, penyelenggara, pengurus, atau tim teknis). Jumlah total penduduk usia 10 tahun ke atas: Total jumlah individu yang berusia 10 tahun ke atas dalam populasi yang dihitung.	Persentase = (Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni dalam 3 bulan terakhir dibagi dengan total penduduk usia 10 tahun ke atas) dikali dengan 100%	2,54	2,62	2,7	2,78	2,86	2,94	3,02	Indikator Program

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI HITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
16	Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Terhadap Total Pendaftaran	%	<p>- Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.</p> <p>- Benda Cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya,</p>	<p>Jumlah benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan DIBAGI Jumlah benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang didaftarkan DIKALI 100%.</p> <p>Interpretasi: Untuk membandingkan jumlah benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap jumlah yang telah didaftarkan</p>	22,56	23,70	24,82	25,90	26,95	27,97	28,97	- Indikator Program - Indikator IUP RPJPD 2025-2045









NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI HITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
17	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persentase	persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik didefinisikan sebagai persentase guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dari total guru	Persentase = (Guru yang memiliki sertifikat pendidik dibagi dengan jumlah total Guru) dikali dengan 100%	92	93	95	96	100	100	100	Indikator Program
18	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar adalah proporsi anak-anak dalam rentang usia 7 hingga 12 tahun yang terdaftar dan mengikuti pendidikan dasar dibandingkan dengan total jumlah anak dalam rentang usia tersebut. Pendidikan dasar mencakup jenjang pendidikan yang biasanya mencakup sekolah dasar (SD), dan merupakan tahap awal dari sistem pendidikan formal	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar ----- x 100 % Jumlah anak usia 7 12 tahun pada provinsi yang bersangkutan	99,81	99,93	99,94	99,95	99,96	99,97	99,98	- Indikator Program - Indikator LPPD

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI HITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
19	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah didefinisikan sebagai skor rata-rata hasil survei kepuasan pegawai terhadap pelayanan dan sistem kerja di lingkungan Dinas	Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat	-	87,07	88,18	89,18	89,39	89,59	89,80	Indikator Program
20	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi pendidikan pertama dalam menengah	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama ----- x 100 % Jumlah anak usia 13 15 tahun pada provinsi yang bersangkutan	99,26	99,88	99,89	99,91	99,93	99,95	99,97	- Indikator Program - Indikator LPPD

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI HITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
21	Iklim Keamanan SMP	%	Definisi Konseptual Indikator: Tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik dari hal rasa aman disatuan pendidikan, perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan satuan pendidikan Sumber Data : Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah	Nilai iklim keamanan SMP (berdasarkan rapor pendidikan tahun (N-1))	67,31	64,59	66,59	68,59	70,59	72,59	74,59	Indikator Program
22	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	Definisi Konseptual Indikator: Partisipasi anak usia 5-6 tahun yang mengenyam pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan (APS) Sumber Data : Survei Sosial Ekonomi Nasional	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	50,01	53,27	55,27	57,27	59,27	62,27	65,27	- Indikator Program - Indikator SPM - Indikator LPPD

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI HITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			(Badan Pusat Statistik) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah									
23	Iklim Keamanan Kesetaraan	%	iklim keamanan pendidikan kesetaraan didefinisikan sebagai skor rata-rata persepsi rasa aman dan kenyamanan peserta didik serta tenaga pendidik di satuan pendidikan kesetaraan	Nilai iklim keamanan kesetaraan (berdasarkan rapor pendidikan tahun (N-1))	67,31	64,59	66,59	68,59	70,59	72,59	74,59	Indikator Program

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI HITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
24	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	<div>Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ----- x 100 %</div> <div>Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan</div>	54,44	54,67	55,67	56,67	57,67	58,67	59,67	- Indikator Program - Indikator SPM - Indikator LPPD

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI HITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
25	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca SD/Sederajat	%	Merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap” sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan	<p>Jumlah peserta didik dengan kemampuan literasi sesuai kewenangan kabupaten/kota yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi DIBAGI Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten/kota DIKALI 100%.</p> <p>Interpretasi: Misal: Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca tahun 2022 sebesar 29,16%. Artinya, ada 29,16% siswa di Indonesia atau sebanyak 83.808 siswa yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”).</p>	85,56	87,71	88,33	88,94	89,56	90,17	90,79	- Indikator Program - Indikator SPM - Indikator IUP RPJPD 2025-2045

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI HITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
26	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SD/Sederajat	%	Merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap” sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan	Jumlah peserta didik dengan kemampuan numerasi sesuai kewenangan kabupaten/kota yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk numerasi DIBAGI Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten/kota DIKALI 100%	78,31	78,62	78,93	79,25	79,56	79,87	80,18	- Indikator Program - Indikator SPM - Indikator IUP RPJPD 2025-2045
27	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca SMP/Sedera	%	Merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki	Jumlah peserta didik dengan kemampuan literasi sesuai kewenangan kabupaten/kota yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi DIBAGI Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten/kota DIKALI 100%	91,82	91,96	92,11	92,25	92,39	92,54	92,68	- Indikator Program - Indikator SPM - Indikator IUP RPJPD 2025-2045



NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI HITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	jat		level hasil belajar minimal “cakap” sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan									
28	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SMP/Sedera jat	%	Merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap” sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan	Jumlah peserta didik dengan kemampuan numerasi sesuai kewenangan kabupaten/kota yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk numerasi DIBAGI Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten/kota DIKALI 100%	88,26	88,43	88,60	88,78	88,95	89,12	89,29	- Indikator Program - Indikator SPM - Indikator IUP RPJPD 2025-2045

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI HITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
29	Iklim Keamanan PAUD	%	iklim keamanan PAUD didefinisikan sebagai skor rata-rata persepsi rasa aman anak-anak dan orang tua serta laporan insiden di PAUD	Nilai iklim keamanan PAUD (berdasarkan rapor pendidikan tahun (N-1))	73,21	74,59	75,59	76,59	77,59	78,59	79,59	Indikator Program
30	Iklim Keamanan SD	%	iklim keamanan SD didefinisikan sebagai skor rata-rata persepsi rasa aman dan kenyamanan siswa serta laporan insiden bullying di SD	Nilai iklim keamanan SD (berdasarkan rapor pendidikan tahun (N-1))	73,37	75,23	75,33	75,43	75,53	75,63	75,73	Indikator Program
31	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi Kesetaraan	%	Merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap” sebagaimana	Jumlah peserta didik dengan kemampuan numerasi sesuai kewenangan kabupaten/kota yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk numerasi DIBAGI Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten/kota DIKALI 100%	61,99	63,19	64,39	65,59	66,79	67,99	69,19	Indikator Program

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI HITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			tertuang dalam Rapor Pendidikan									
32	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat: (a) perempuan/ laki-laki	%	<p>APK SMP/ sederajat perempuan adalah persentase jumlah siswa perempuan yang terdaftar di SMP dengan jumlah penduduk perempuan usia 13-15 tahun.</p> <p>Ini merupakan indikator SDG yang diambil komponennya sesuai kewenangan kota. Indikator ini ditujukan untuk melihat kesenjangan atau disparitas antar</p>	<p>Rumus Rasio APK antara Perempuan dan laki laki:</p> <div><math display="block">RG_i = \frac{APK_{Pi}}{APK_{Li}} \times 100\%</math></div> <p>Keterangan: RGi : Rasio antara APK perempuan dan laki laki di jenjang pendidikan i</p> <p>APK<sub>Pi</sub> : APK perempuan di jenjang pendidikan i</p> <p>APK<sub>Li</sub> : APK laki-laki di jenjang pendidikan i</p>	109,05	105,01	106,13	107,25	108,37	109,49	109,55	Indikator SDGs



NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI HITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			menunjukkan tingginya kesenjangan akses pendidikan antar kelompok ekonomi sosial									
33	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat: (a) perempuan/ laki-laki	%	APM SD/ sederajat laki-laki adalah persentase siswa laki-laki usia 7-12 tahun yang terdaftar di SD dengan jumlah penduduk laki-laki usia 7-12 tahun. Indikator ini ditujukan untuk melihat kesenjangan atau disparitas antar kelompok dalam mengakses pendidikan. Ini merupakan indikator SDG yang diambil komponennya sesuai kewenangan kota. Indikator ini ditujukan untuk melihat kesenjangan atau disparitas antar kelompok dalam mengakses pendidikan. Indikator berupa	<div>Rumus Rasio APM-SD antara Perempuan dan laki-laki:</div> <div><math display="block">RG = \frac{APM_p}{APM_L} \times 100\%</math></div> <div>Keterangan:</div> <div>RG : Rasio antara APM perempuan dan laki-laki pada usia 7 sampai 12 tahun</div> <div>APM<sub>p</sub> : APM perempuan untuk usia 7 sampai 12 tahun</div> <div>APM<sub>L</sub> : APM laki-laki untuk usia 7 sampai 12 tahun</div>	99,02	98,23	98,43	98,63	98,83	99,03	99,04	Indikator SDGs



[illegible]

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI HITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
35	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase	<p>Definisi Konseptual Indikator: Partisipasi anak usia 7-15 tahun yang mengenyam pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan.</p> <p>Definisi Operasional Indikator: Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 7 (tujuh)sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan</p> <p>dengan rentang nilai 0-100</p> <p>Catatan: APS hanya mengukur partisipasi (kuantitas/akses), tidak mengukur kualitas pendidikan (misalnya mutu pembelajaran, hasil belajar)</p>	<p>Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang mengenyam pendidikan/berpartisipasi dalam pendidikan dasar</p> <p>Interpretasi: Nilai APS mendekati 100 berarti hampir seluruh anak usia 7–15 tahun di wilayah tersebut bersekolah — menunjukkan akses pendidikan dasar yang luas. Jika APS jauh di bawah 100, hal ini menunjukkan ada bagian populasi usia sekolah yang tidak bersekolah — perlu intervensi kebijakan untuk meningkatkan akses pendidikan</p>	99,65	99,66	99,67	99,68	99,69	99,70	99,71	Indikator SPM



NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI HITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
36	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.	Persenta se	<p>1. Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/ sederajat, (iv) SMA/SMK/ sederajat , dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>2. Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/ sederajat, (iv) SMA/SMK/ sederajat , dan (v) PLB yang memiliki sertifikat pendidik.</p>	<p>1. Jumlah guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/ sederajat, (iv) SMA/SMK/ sederajat, dan (v) PLB yang berkualifikasi S1/D4 dibagi dengan jumlah seluruh guru pada jenjang yang sama, dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>2. Jumlah guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/ sederajat, (iv) SMA/SMK/ sederajat, dan (v) PLB yang bersertifikat pendidik dibagi dengan jumlah seluruh guru pada jenjang yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus 1:</p> <div><math display="block">PGK_i = \frac{JGK_i}{JG_i} \times 100\%</math></div> <p>Keterangan:</p> <p>PGK<sub>i</sub> : Persentase guru di jenjang pendidikan i dengan kualifikasi yang sesuai dengan standar nasional</p> <p>JGK<sub>i</sub> : Jumlah guru di jenjang pendidikan i dengan kualifikasi yang sesuai dengan standar nasional</p> <p>JG<sub>i</sub> : Jumlah guru di jenjang pendidikan i</p>	95,5	96,5	97,5	98,5	99	99,5	100	Indikator SDGs

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI HITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				<p>Rumus 2:</p> <div><math display="block">PGSPSi = \frac{JGSPSi}{JGSi} \times 100\%</math></div> <p>Keterangan:</p> <p>PGSPSi : Persentase guru pada tingkat pendidikan i yang memiliki sertifikat pendidik</p> <p>JGSPSi : Jumlah guru pada tingkat pendidikan i yang memiliki sertifikat pendidik</p> <p>JGSi : Jumlah seluruh guru pada tingkatan pendidikan i</p> <p>Catatan:</p> <p>i menyatakan jenjang pendidikan yang terdiri dari:</p> <p>a. TK/RA/BA,</p> <p>b. SD/ sederajat,</p> <p>c. SMP/ sederajat,</p> <p>d. SMA/ SMK/ sederajat, dan</p> <p>e. PLB</p>								
37	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	(%)	Indikator ini mengukur angka partisipasi anak usia 6 tahun (satu tahun sebelum usia resmi masuk Sekolah Dasar) dalam program pendidikan yang terorganisir, yaitu: a. Pendidikan anak usia dini (Pra-sekolah) yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK),	<div><math display="block">TP_6 = \frac{(N_{6PAUD} + N_{6SD})}{N_6} \times 100\%</math></div> <p>Keterangan:</p> <p>TP<sub>6</sub> : Tingkat partisipasi anak usia 6 tahun di program pembelajaran yang terorganisir</p> <p>N<sub>6PAUD</sub> : Jumlah anak usia 6 tahun yang belajar di PAUD pada periode tertentu</p> <p>N<sub>6SD</sub> : Jumlah anak usia 6 tahun yang belajar di SD pada periode tertentu</p> <p>N<sub>6</sub> : Jumlah populasi anak usia 6 tahun pada periode yang sama</p>	70,96	72,96	74,96	76,96	78,96	80,96	82,96	Indikator SDGs



NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI HITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
38	Terlestarikannya cagar budaya	%	<p>Pemusnahan cagar budaya merupakan masalah serius yang dapat berdampak negatif pada sejarah, identitas budaya, dan warisan suatu bangsa. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terlestarikannya cagar budaya antara lain: 1. Perubahan Iklim dan Bencana Alam: Gempa bumi, banjir, dan bencana alam lainnya dapat merusak atau menghancurkan cagar budaya. 2. Pengembangan Infrastruktur: Pembangunan jalan, gedung, dan proyek infrastruktur lainnya sering kali mengorbankan situs-situs bersejarah jika tidak ada upaya pelestarian yang memadai. 3. Perusakan dan Vandalisme: Tindakan perusakan oleh individu atau kelompok yang tidak bertanggung jawab dapat merusak cagar budaya. 4. Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan: Ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya pelestarian cagar budaya dapat menyebabkan kurangnya dukungan dan upaya pelestarian. 5. Ekonomi dan Politik: Faktor ekonomi dan kebijakan politik yang tidak mendukung pelestarian bisa mengancam keberlangsungan cagar budaya. 6. Kurangnya Dana dan Sumber Daya: Upaya pelestarian sering kali terhambat oleh terbatasnya dana dan sumber daya yang tersedia untuk menjaga dan merawat situs-situs bersejarah. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi: 1. Edukasi dan Penyadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian cagar budaya melalui pendidikan dan kampanye publik. 2. Kebijakan Pemerintah: Membuat dan menerapkan kebijakan yang mendukung pelestarian cagar budaya serta memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak merusak situs-situs bersejarah. 3. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat lokal dalam upaya pelestarian, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap cagar budaya di wilayah mereka. 4. Pendanaan dan Sumber Daya: Mencari sumber dana dari pemerintah, swasta, dan organisasi internasional untuk mendukung upaya pelestarian. 5. Teknologi dan Inovasi: Menggunakan teknologi modern untuk mendokumentasikan,</p>	<p>Jumlah cagar budaya yang dilestarikan</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah cagar budaya yang terdata</p>	-	-	48	49	50	51	52	Indikator LPPD



## BAB V PENUTUP

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan Periode 2025-2029.

Dokumen perencanaan ini akan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, maupun arah kebijakan pembangunan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan selama 5 (lima) tahun mendatang (2025-2029).

Capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini, akan menjadi cerminan keberhasilan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan tata kerja yang efisien dan sinergitas di lingkup internal maupun eksternal serta adanya dukungan dan peran aktif berbagai pihak/stakeholder yang diharapkan dapat mendorong tercapainya keberhasilan pembangunan Kota Balikpapan khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan menunjang Visi Kota Balikpapan “Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua dalam Bingkai Madinatul Iman”.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah daerah sebagai entitas terkecil yang membentuk suatu negara memegang peranan penting dalam perkembangan negara tersebut. Sebagai unit fungsional negara, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Karakteristik setiap daerah dengan tantangan dan peluangnya dalam pembangunan daerah perlu diselaraskan dengan rencana pembanguna pemerintah pusat agar tujuan pmbangunan nasional terwujud. Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan diperlukan strategi perencanaan yang sistematis, terpadu, terarah, dan berkelanjutan melalui dokumen Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan lima tahunan.

Renstra sebagai dokumen perencanaan jangka menengah memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam jangka waktu lima tahun. Renstra menjadi pedoman dakam penyelenggaraan program tiap perangkat daerah agar setiap program dan kegiatan berjalan terarah, terukur dans sistematis sesuai dengan potensi daerah.

Dinas Kesehatan merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki kewajiban untuk menyusun rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam beberapa regulasi pemerintah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pentingnya setiap pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara berjenjang, termasuk urusan kesehatan sebagai urusan wajib pelayanan dasar. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur mengenai tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk penyusunan rencana strategis perangkat daerah. Selanjutnya, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 mengarahkan Wali Kota untuk memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan memiliki nilai strategis yang sangat penting dalam memastikan arah pembangunan kesehatan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Nilai strategis tersebut tercermin dalam kemampuannya untuk

menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menjawab permasalahan kesehatan secara kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat di daerah. Di Kota Balikpapan, nilai strategis Renstra terletak pada perannya sebagai landasan dalam pengambilan keputusan yang berbasis data dan bukti, serta dalam menentukan prioritas program kesehatan yang berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu, Renstra juga menjadi alat untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah melalui indikator yang terukur dan terarah.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
- d. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045
- h. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2045.
- i. Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2025-2029

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

- a. Maksud  
Renstra Dinas Kesehatan disusun sebagai acuan strategis dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di tingkat kabupaten/kota, yang mendukung



pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah serta sejalan dengan kebijakan nasional dalam bidang kesehatan

b. Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Balikpapan ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan daerah selama periode tahun 2025-2029.
2. Menyelaraskan program dan kegiatan Dinas Kesehatan dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan Kesehatan melalui perencanaan yang terukur dan berbasis data.
4. Menjadi dasar evaluasi kinerja Dinas Kesehatan dalam mencapai target pembangunan kesehatan.
5. Menjadi pedoman bagi dinas kesehatan dalam menyusun rencana kerja.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2025- 2029 disusun sesuai dengan ketentuan sistematika yang tertuang dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN**

**2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

- 2.1.a** Tugas, fungsi dan struktur Dinas Kesehatan
- 2.1.b** Sumber Daya Dinas Kesehatan
- 2.1.c** Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
- 2.1.d** Kelompok sasaran layanan Dinas Kesehatan
- 2.1.e** Mitra Dinas Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan

**BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 3.1 Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Resntra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

3.3 Strategi Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

3.4 Arah Kebijakan Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

#### BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

4.2 **Uraian Kegiatan**

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah

4.5 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan

4.6 Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

#### BAB V. PENUTUP

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN**

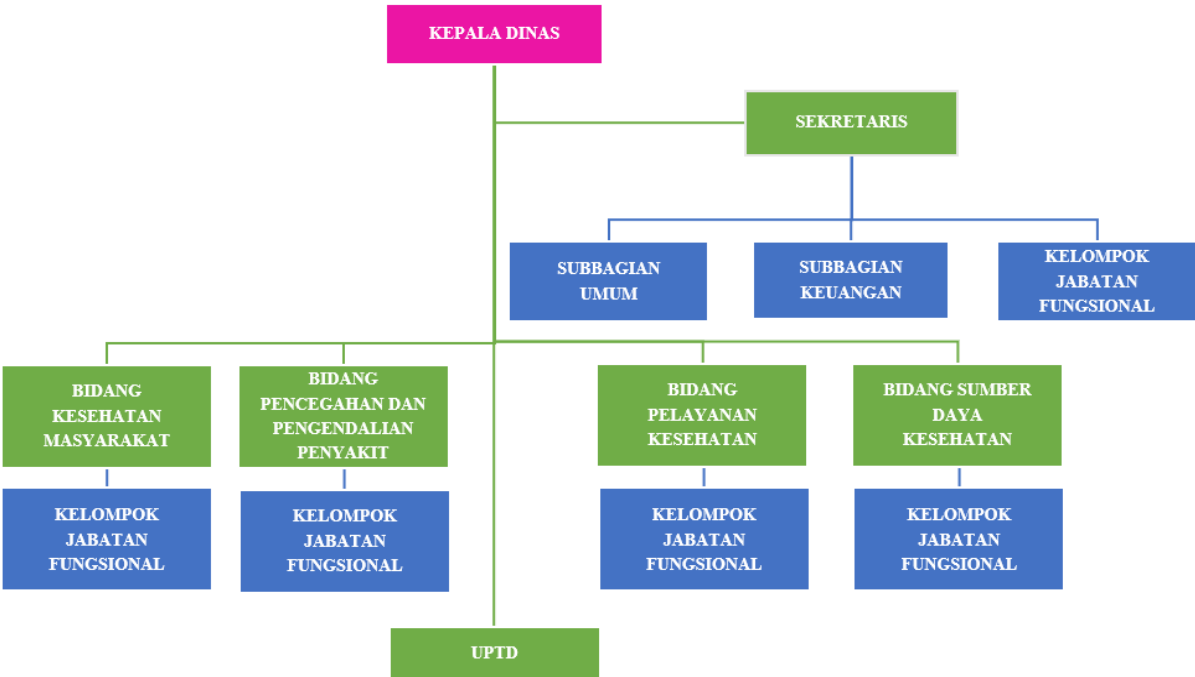
**2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

**2.1.e Tugas, fungsi dan struktur Dinas Kesehatan**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka susunan struktur organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. UPTD

Gambar 1  
STRUKTUR ORGANISASI



Dinas Kesehatan Kota Balikpapan merupakan unsur pelaksana urusan

pemerintahan bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kota. Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan bidang kesehatan;
- b. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan operasional di bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas , pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada UPT Dinas;
- d. Pelaksanaan pembinaan seluruh fasilitasi pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan tradisional di daerah;
- e. Pengelolaan kesekretariatan Dinas;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Tugas dan fungsi yang dimaksud juga telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

b. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian:

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
2. Administrasi Keuangan;
3. Administrasi barang milik daerah pada Dinas;
4. Administrasi kepegawaian;
5. Administrasi umum;
6. Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah;

8. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah;
9. Layanan informasi dan pengaduan; dan
10. Pembinaan pelayanan publik.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
2. pengkoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
3. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
4. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
5. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
6. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
7. pengelolaan anggaran Dinas dan penerimaan Dinas;
8. pelaksanaan administrasi keuangan;
9. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
10. pembinaan dan fasilitasi penyusunan Stándar Pelayanan Publik;
11. pengelolaan survey kepuasan masyarakat;
12. pengelolaan pengaduan masyarakat;
13. pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pelaksana;
14. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
15. pengoordinasian bidang dan UPTD;
16. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
17. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat terdiri atas:

1. Subbagian Umum, mempunyai tugas:
  - melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
  - mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
  - melaksanakan urusan rumah tangga , keamanan kantor dan mempersiapkan sarana dan prasarana kantor;
  - menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
  - melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;

- melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik daerah;
- melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventaris barang;
- menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- mengkoordinir penyusunan kebijakan bidang kesehatan;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas:

- menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- mengkoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
- menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- mengkoordinir dan meneliti anggaran;
- menyusun laporan keuangan;
- melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Substansi Program mempunyai tugas :

- melaksanakan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang meliputi :
  - 1) rencana strategis;
  - 2) rencana kerja;
  - 3) rencana kerja tahunan;
  - 4) penetapan kinerja; dan

5) laporan kinerja.

- melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas;
- mengoordinasikan pembangunan, pengembangan pemeliharaan aplikasi dengan bidang;
- melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas bidang;
- melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- mengelola informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
- menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan serta informasi layanan dan pengaduan;
- memfasilitasi pembinaan tata kelola pelayanan publik;
- menyusun laporan pelaksanaan dan kegiatan Dinas;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

1. penyusunan program dan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat;
2. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

3. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
4. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
5. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
7. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengelompokan substansi Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan uraian tugas yang terdiri atas:

1. Substansi Kesehatan Keluarga, mempunyai tugas:
  - menyusun program dan kegiatan Substansi Kesehatan Keluarga;
  - menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga;
  - menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penerapan standar pelayanan kesehatan keluarga berdasar siklus kehidupan;
  - melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga;
  - melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/ atasan terkait dengan bidang tugasnya.
2. Substansi Promosi, Pemberdayaan Masyarakat dan kesehatan Lingkungan, mempunyai tugas:
  - menyusun program dan kegiatan Substansi Promosi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan;
  - menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan lingkungan;
  - melaksanakan kebijakan operasional di bidang promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan lingkungan;
  - memberikan bimbingan teknis dan supervisi promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan lingkungan;



- memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan lingkungan;
- melaksanakan pemberian layanan rekomendasi dan sertifikasi laik sehat;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/ atasan terkait dengan bidang tugasnya.

3. Substansi Gizi, Kesehatan Kerja dan Olah Raga, mempunyai tugas:

- menyusun program dan kegiatan substansi gizi, kesehatan kerja dan olah raga;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan gizi, kesehatan kerja, dan kesehatan olahraga;
- melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan gizi, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan gizi, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan gizi kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/ atasan terkait dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang pencegahan dan Pengendalian penyakit mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit melaksanakan fungsi:

1. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans, imunisasi, pencegahan penyakit menular, pengendalian penyakit menular, pencegahan penyakit tidak menular, pengendalian penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa dan Napza;

3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans, imunisasi, pencegahan penyakit menular, pengendalian penyakit menular, pencegahan penyakit tidak menular, pengendalian penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa dan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
4. Penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang surveilans, imunisasi, pencegahan penyakit menular, pengendalian penyakit menular, pencegahan penyakit tidak menular, pengendalian penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa dan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans, imunisasi, pencegahan penyakit menular, pengendalian penyakit menular, pencegahan penyakit tidak menular, pengendalian penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa dan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/ atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pengelompokan substansi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan uraian tugas yang terdiri dari atas:

1. Substansi Surveilans dan Imunisasi, mempunyai tugas:
  - menyusun program dan kegiatan Substansi Surveilans dan Imunisasi;
  - menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi;
  - melaksanakan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi;
  - memberikan bimbingan teknis di bidang surveilans dan imunisasi;
  - memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi;
  - melaksanakan surveilans, mengolah dan menganalisa data penyakit, bencana, dan imunisasi;
  - mengembangkan jejaring surveilans penyakit dan bencana;
  - melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/ atasan terkait dengan bidang tugasnya.
2. Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, mempunyai tugas:

- menyusun program dan kegiatan substansi pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan penyakit menular dan pengendalian penyakit menular;
- melaksanakan kebijakan operasional di bidang pencegahan penyakit menular dan pengendalian penyakit menular;
- memberikan bimbingan teknis di bidang pencegahan penyakit menular dan pengendalian penyakit menular;
- memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan penyakit menular dan pengendalian penyakit menular;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/ atasan terkait dengan bidang tugasnya.

3. Substansi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, mempunyai tugas:

- menyusun program dan kegiatan substansi pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- memberikan bimbingan teknis di bidang pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/ atasan terkait dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Kesehatan melaksanakan fungsi:

1. penyusunan program dan kegiatan bidang pelayanan kesehatan;
2. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan;
3. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan;
4. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan;
5. pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan;
6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
7. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan/atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pengelompokan substansi Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan uraian tugas yang terdiri atas:

1. Substansi Pelayanan Kesehatan Primer, mempunyai tugas:
  - menyusun program dan kegiatan substansi pelayanan kesehatan primer;
  - mengkoordinasi dan fasilitasi bidang pelayanan kesehatan primer;
  - menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer;
  - melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer;
  - memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer;
  - melaksanakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer;
  - melaksanakan penatausahaan pembiayaan penerima bantuan iuran kesehatan;
  - memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer;

- melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin/ atasan terkait dengan bidang tugasnya.

-

2. Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan, mempunyai tugas:

- menyusun program dan kegiatan substansi pelayanan kesehatan rujukan;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- melaksanakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
- melaksanakan kegiatan sistem informasi rumah sakit;
- melaksanakan dan memfasilitasi pelayanan medik dasar/ kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan;
- melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi bantuan sarana pertolongan kegawat daruratan terpadu (public safety center);
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/ atasan terkait dengan bidang tugasnya.

3. Substansi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas;

- menyusun program dan kegiatan sesuai substansi pelayanan kesehatan tradisional dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang mutu pelayanan kesehatan tradisional dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan;
- melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan tradisional dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan;
- memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan tradisional dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan;
- memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan tradisional dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan;

- menyiapkan bahan rekomendasi/ saran teknis perizinan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/ atasan terkait dengan bidang tugasnya.

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Sumber Daya Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sumber Daya Kesehatan melaksanakan fungsi:

1. penyusunan program dan kegiatan bidang sumber daya kesehatan;
2. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya kesehatan;
3. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya kesehatan;
4. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya kesehatan;
5. pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya kesehatan;
6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/ atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pengelompokan substansi Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan uraian tugas yang terdiri atas:

1. Substansi Kefarmasian, mempunyai tugas:
  - menyusun program dan kegiatan substansi kefarmasian, yang meliputi obat, makanan, minuman, kosmetika, obat tradisional dan bahan berbahaya;
  - menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kefarmasian;
  - melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan kefarmasian;
  - memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kefarmasian;
  - memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kefarmasian;

- melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian peredaran bahan berbahaya di bidang kefarmasian;
- menyiapkan bahan penerbitan/ pencabutan sertifikat produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga;
- menyiapkan bahan penerbitan sertifikat laik sehat terhadap pangan siap saji, uji sampel, izin iklan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/ atasan terkait dengan bidang tugasnya.

2. Substansi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, mempunyai tugas:

- menyusun program dan kegiatan substansi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- melaksanakan kebijakan operasional di bidang alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- melaksanakan pengawasan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- menyiapkan bahan penerbitan/ pencabutan sertifikat produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga perusahaan rumah tangga serta tindak lanjut hasil pengawasan;
- memberikan rekomendasi perizinan penyalur alat kesehatan;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/ atasan terkait dengan bidang tugasnya.

3. Substansi Sumber Daya Manusia dan Sarana Kesehatan, mempunyai tugas:

- menyusun program dan kegiatan substansi sumber daya manusia dan sarana kesehatan
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang sumber daya manusia dan sarana dan sarana kesehatan;
- menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- merencanakan dan melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan;
- melaksanakan kebijakan operasional di bidang sumber daya manusia dan sarana kesehatan;
- melaksanakan pengembangan tenaga kesehatan dan nonkesehatan;
- memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sumber daya manusia dan sarana kesehatan;
- memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang sumber daya manusia dan sarana kesehatan;
- melaksanakan peningkatan dan pembangunan sarana kesehatan;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/ atasan terkait dengan bidang tugasnya.

g. UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah).

Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sejumlah Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) yang tersebar merata di seluruh kecamatan Kota Balikpapan. Jejaring pelayanan kesehatan primer ini diwujudkan melalui 27 Puskesmas yang menjadi ujung tombak dan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat di seluruh wilayah kota. Sebagai pendukung, Instalasi Farmasi Kota memastikan ketersediaan, keamanan, dan mutu obat serta alat kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan. Sementara itu, Laboratorium Kesehatan Daerah berperan sebagai pusat rujukan pemeriksaan laboratorium yang andal untuk menegakkan diagnosis dan mendukung surveilans penyakit. Selain itu Dinas Kesehatan memiliki UPTD Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang hadir secara khusus untuk memberikan perhatian, assessment, dan intervensi dini bagi anak dengan kebutuhan khusus, menyempurnakan ekosistem layanan kesehatan



yang inklusif di Kota Balikpapan. Keberagaman UPTD ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota untuk memberikan cakupan kesehatan yang menyeluruh, dari tingkat promotif-preventif hingga kuratif-rehabilitatif.

**h. UOBK (Unit Organisasi Bidang Kesehatan)**

Di luar struktur UPTD di bawah Dinas Kesehatan, Pemerintah Kota Balikpapan juga mengelola dua rumah sakit sebagai Unit Organisasi Bidang Kesehatan (UOBK), yaitu RSUD Beriman dan RSIA Sayang Ibu. Dinas Kesehatan berperan sebagai regulator, perencana kebijakan, dan pembina teknis bagi seluruh fasilitas kesehatan, termasuk kedua rumah sakit tersebut. Sinergi ini dimanifestasikan dalam sistem rujukan terintegrasi, surveilans penyakit, penanggulangan wabah, dan pencapaian program prioritas kesehatan kota. Dengan demikian, meskipun terpisah secara struktural, kedua rumah sakit ini merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari ekosistem kesehatan Kota Balikpapan, memastikan kelangsungan pelayanan dari tingkat primer hingga lanjutan.

**2.1.e Sumber Daya Dinas Kesehatan**

Sumber daya kesehatan merupakan unsur strategis dalam sistem pelayanan kesehatan, yang meliputi sumber daya manusia (tenaga kesehatan), fasilitas kesehatan, perbekalan farmasi, serta dukungan pembiayaan. Ketiga elemen ini saling berkaitan erat dan membentuk fondasi yang kokoh bagi terselenggaranya layanan kesehatan yang optimal. Ketersediaan yang memadai dan pemanfaatan yang tepat dari seluruh komponen tersebut secara efektif, efisien, dan berkeadilan sangat menentukan keberhasilan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan. Untuk memahami kondisi aktual, berikut disajikan data dan gambaran situasi terkini mengenai sumber daya kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

**a. Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Sumber Daya Manusia Kesehatan merupakan pilar utama dalam mendukung pembangunan kesehatan yang berkelanjutan. Tenaga kesehatan yang tersedia dalam jumlah yang cukup, tersebar secara merata, dan memiliki kompetensi yang sesuai sangat menentukan mutu layanan kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan SDM secara terencana dan berbasis kebutuhan menjadi aspek krusial dalam meningkatkan kualitas sistem pelayanan kesehatan. Berikut disajikan data terkini mengenai situasi Sumber Daya Manusia Kesehatan di wilayah Kota Balikpapan.

1. Tenaga Medis (Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi)

**Tabel 2.1 Jumlah Tenaga Medis (Dokter dan Dokter Spesialis) di Fasilitas Kesehatan Tahun 2025**

No.	Unit Kerja	DOKTER			DOKTER SPESIALIS			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Puskesmas Graha Indah	0	3	3	0	0	0	0	3	3
2	Puskesmas Sepinggan	2	3	5	0	0	0	2	3	5
3	Puskesmas Damai	1	1	2	0	0	0	1	1	2
4	Puskesmas Klandasan Ilir	0	6	6	0	0	0	0	6	6
5	Puskesmas Prapatan	0	3	3	0	0	0	0	3	3
6	Puskesmas Gunung Bahagia	0	3	3	0	0	0	0	3	3
7	Puskesmas Telaga Sari	0	2	2	0	0	0	0	2	2
8	Puskesmas Manggar	0	2	2	0	0	0	0	2	2
9	Puskesmas Lamaru	0	3	3	0	0	0	0	3	3
10	Puskesmas Teritip	2	1	3	0	0	0	2	1	3
11	Puskesmas Manggar Baru	2	2	4	0	0	0	2	2	4
12	Puskesmas Batu Ampar	0	2	2	0	0	0	0	2	2
13	Puskesmas Karang Joang	0	7	7	0	0	0	0	7	7
14	Puskesmas Gunung Samarinda	0	3	3	0	0	0	0	3	3
15	Puskesmas Muara Rapak	2	1	3	0	0	0	2	1	3
16	Puskesmas Mekar Sari	0	7	7	0	0	0	0	7	7
17	Puskesmas Karang Jati	0	3	3	0	0	0	0	3	3
18	Puskesmas Gunung Sari Ilir	1	1	2	0	0	0	1	1	2
19	Puskesmas Karang Rejo	1	1	2	0	0	0	1	1	2
20	Puskesmas Sumber Rejo	0	3	3	0	0	0	0	3	3
21	Puskesmas Gunung Sari Ulu	0	2	2	0	0	0	0	2	2
22	Puskesmas Baru Ulu	1	3	4	0	0	0	1	3	4
23	Puskesmas Kariangau	1	3	4	0	0	0	1	3	4
24	Puskesmas Baru Ilir	0	3	3	0	0	0	0	3	3
25	Puskesmas Margo Mulyo	0	2	2	0	0	0	0	2	2
26	Puskesmas Baru Tengah	1	2	3	0	0	0	1	2	3
27	Puskesmas Margasari	0	2	2	0	0	0	0	2	2
28	LABKESDA	0	0	0	0	1	1	0	1	1

No.	Unit Kerja	DOKTER			DOKTER SPESIALIS			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
29	IFK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	BL ABK	0	1	1	0	0	0	0	1	1
31	RS Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo	15	38	53	35	28	63	50	66	116
32	RS Pertamina Balikpapan	18	18	36	34	21	55	52	39	91
33	RS Tk. II Dr. R. Hardjanto	8	15	23	17	9	26	25	24	49
34	RS Restu Ibu	19	15	34	37	32	69	56	47	103
35	RS Ibu dan Anak Sayang Ibu	0	7	7	2	5	7	2	12	14
36	RS Bhayangkara Balikpapan	6	18	24	26	23	49	32	41	73
37	RS Medika Utama Permata	3	8	11	11	5	16	14	13	27
38	RS Siloam Hospitals Balikpapan	10	13	23	35	26	61	45	39	84
39	RS Umum Balikpapan Baru	5	11	16	12	16	28	17	27	44
40	RS Umum Tk. IV Lanud Balikpapan	3	3	6	1	1	2	4	4	8
41	RS Umum Daerah Beriman	10	17	27	16	19	35	26	36	62
42	RS Khusus Mata SMEC Balikpapan	2	0	2	3	5	8	5	5	10
43	RS Ibu Anak Asih Balikpapan	0	5	5	5	4	9	5	9	14
44	RS Hermina Balikpapan	1	22	23	28	43	71	29	65	94
45	RS Medika Utama Manggar	2	6	8	7	5	12	9	11	20
46	Rumah Sakit Pertamina Panorama Balikpapan	4	4	8	5	8	13	9	12	21
47	Fasilitas Kesehatan Lainnya	60	141	201	13	23	36	73	164	237
Jumlah		180	416	596	287	274	561	467	690	1157
Rasio Terhadap 100.000 Penduduk				76,729			72,224			148,95

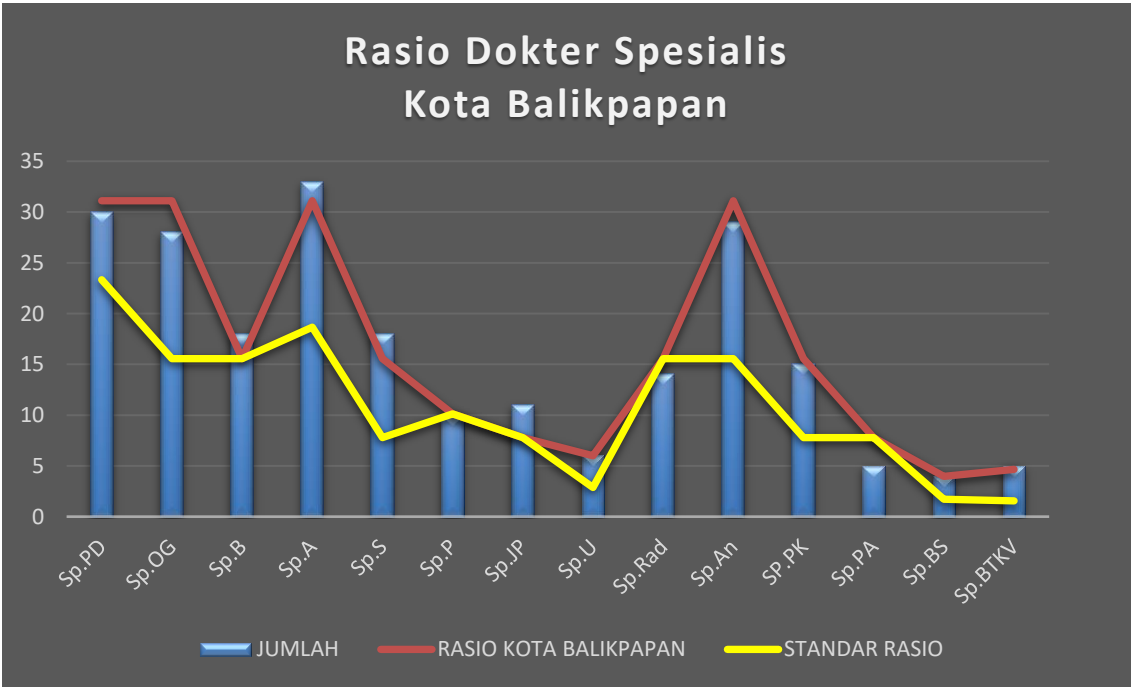
Sumber: Bidang SDK Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, 31 Agustus 2025

Tabel 2.1 menyajikan distribusi tenaga medis, yaitu dokter umum dan dokter spesialis, di berbagai fasilitas kesehatan di Kota Balikpapan tahun 2025. Tabel ini penting untuk menilai sebaran dokter dan dokter spesialis layanan medis dasar dan lanjutan di seluruh wilayah kota Balikpapan. Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Secara agregat, Kota Balikpapan telah memenuhi bahkan melampaui rasio nasional. Total tenaga dokter adalah 1.157 orang dengan rasio 148,95 per 100.000 penduduk

(1,48 dokter per 1000 penduduk) . Jumlah ini menunjukkan ketersediaan yang sangat baik jika dibandingkan dengan standar nasional dan WHO yaitu 1 dokter per 1.000 penduduk.

Grafik 2. ....

Rasio Dokter Spesialis terhadap 1.000 penduduk tahun 2025



Sumber : Bidang Sumber Daya Kesehatan Tahun 2025

Berdasarkan grafik diatas dapat disampaikan bahwa ketersediaan dokter spesialis di Kota Balikpapan secara keseluruhan telah memenuhi standar nasional dengan beberapa spesialisasi bahkan menunjukkan kinerja di atas target rasio yang direkomendasikan. Terdapat sebelas jenis spesialisasi yang telah memenuhi dan bahkan melampaui standar nasional, yaitu spesialisasi Urologi (0,0077 terhadap standar 0,0037), Bedah Saraf (0,0051 terhadap standar 0,0022), serta Bedah Thorax dan Kardiovaskular (0,006 terhadap standar 0,002). Sementara itu, tujuh spesialisasi lainnya telah tepat memenuhi rasio standar yang ditetapkan, termasuk Spesialis Bedah, Jantung dan Pembuluh Darah, serta Radiologi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem perencanaan ketenagaan kesehatan di daerah telah berjalan secara optimal. Untuk mempertahankan capaian ini, diperlukan penguatan program berkelanjutan melalui sinergi lintas sektor dan optimalisasi mekanisme redistribusi tenaga kesehatan, guna menjamin pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan bagi masyarakat Kota Balikpapan.



No.	Nama Faskes	Dokter Gigi			Dokter Gigi Spesialis			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
31	RS Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo	0	1	1	1	1	2	1	2	3
32	RS Pertamina Balikpapan	4	4	8	2	2	4	6	6	12
33	RS Tk. II Dr. R. Hardjanto	0	1	1	0	1	1	0	2	2
34	RS Restu Ibu	1	1	2	3	3	6	4	4	8
35	RS Ibu dan Anak Sayang Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	RS Bhayangkara Balikpapan	0	1	1	1	1	2	1	2	3
37	RS Medika Utama Permata	0	3	3	0	0	0	0	3	3
38	RS Siloam Hospitals Balikpapan	3	4	7	1	3	4	4	7	11
39	RS Umum Balikpapan Baru	1	1	2	1	1	2	2	2	4
40	RS Umum Tk. IV Lanud Balikpapan	0	1	1	0	0	0	0	1	1
41	RS Umum Daerah Beriman	0	1	1	1	6	7	1	7	8
42	RS Khusus Mata SMEC Balikpapan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	RS Ibu Anak Asih Balikpapan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	RS Hermina Balikpapan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	RS Medika Utama Manggar	0	1	1	2	4	6	2	5	7
46	Rumah Sakit Pertamina Panorama Balikpapan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	1	1	13	23	36	13	24	37
Jumlah		12	59	71	25	45	70	37	104	141
Rasio Terhadap 100.000 Penduduk				9,14			9,01			18,15

Sumber: Bidang SDK Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, 31 Agustus 2025

Tabel 2.2 memuat data tenaga medis yang terdiri dari dokter gigi dan dokter gigi spesialis di fasilitas kesehatan tahun 2025. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa hanya beberapa puskesmas yang memiliki dokter gigi dan hal ini menunjukkan ketimpangan pelayanan kesehatan gigi yang signifikan. Dengan rasio 18,15 tenaga dokter gigi per 100.000 penduduk, kebutuhan dasar akan tenaga dokter gigi secara agregat telah terpenuhi tetapi terdapat ketimpangan jumlah dokter gigi di tingkat Puskesmas. Beberapa Puskesmas bahkan hanya memiliki 1 orang tenaga dokter gigi ,yang dapat mempengaruhi cakupan dan beban kerja.

### 3. Tenaga Keperawatan dan Tenaga Kebidanan

**Tabel 2.3 Jumlah Tenaga Keperawatan dan Tenaga Kebidanan di Fasilitas Kesehatan Tahun 2025**

No.	Nama Faskes	Tenaga Keperawatan			Tenaga Kebidanan
		L	P	L+P	
1	Puskesmas Graha Indah	2	1	3	6
2	Puskesmas Sepinggan	0	9	9	12
3	Puskesmas Damai	1	5	6	4
4	Puskesmas Klandasan Ilir	4	5	9	9
5	Puskesmas Prapatan	1	4	5	6
6	Puskesmas Gunung Bahagia	2	3	5	5
7	Puskesmas Telaga Sari	0	4	4	5
8	Puskesmas Manggar	0	4	4	4
9	Puskesmas Lamaru	0	4	4	4
10	Puskesmas Teritip	2	3	5	6
11	Puskesmas Manggar Baru	1	8	9	11
12	Puskesmas Batu Ampar	1	3	4	6
13	Puskesmas Karang Joang	6	9	15	8
14	Puskesmas Gunung Samarinda	1	3	4	4
15	Puskesmas Muara Rapak	1	2	3	4
16	Puskesmas Mekar Sari	1	5	6	6
17	Puskesmas Karang Jati	0	3	3	5
18	Puskesmas Gunung Sari Ilir	0	3	3	4
19	Puskesmas Karang Rejo	1	3	4	6
20	Puskesmas Sumber Rejo	0	4	4	3
21	Puskesmas Gunung Sari Ulu	0	4	4	4
22	Puskesmas Baru Ulu	3	6	9	9
23	Puskesmas Kariangau	1	8	9	9
24	Puskesmas Baru Ilir	0	6	6	4
25	Puskesmas Margo Mulyo	0	3	3	4
26	Puskesmas Baru Tengah	2	2	4	5
27	Puskesmas Margasari	0	4	4	2
28	LABKESDA	1	1	2	0
29	IFK	0	0	0	0
30	BL ABK	0	1	1	1
31	RS Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo	233	542	775	7
32	RS Pertamina Balikpapan	121	230	351	49
33	RS Tk. II Dr. R. Hardjanto	31	82	113	8
34	RS Restu Ibu	11	96	107	27
35	RS Ibu dan Anak Sayang Ibu	6	41	47	1
36	RS Bhayangkara Balikpapan	20	58	78	14
37	RS Medika Utama Permata	10	11	21	12
38	RS Siloam Hospitals Balikpapan	32	113	145	10
39	RS Umum Balikpapan Baru	7	50	57	16
40	RS Umum Tk. IV Lanud Balikpapan	2	2	4	0
41	RS Umum Daerah Beriman	27	100	127	8
42	RS Khusus Mata SMEC Balikpapan	4	19	23	0
43	RS Ibu Anak Asih Balikpapan	3	26	29	17

No.	Nama Faskes	Tenaga Keperawatan			Tenaga Kebidanan
		L	P	L+P	
44	RS Hermina Balikpapan	22	98	120	34
45	RS Medika Utama Manggar	3	24	27	8
46	Rumah Sakit Pertamina Panorama Balikpapan	14	36	50	8
47	Fasilitas Kesehatan Lainnya	64	167	231	116
<b>Jumlah</b>		<b>641</b>	<b>1815</b>	<b>2456</b>	<b>491</b>
<b>Rasio Terhadap 100.000 Penduduk</b>				<b>316,19</b>	<b>63,21</b>

Sumber: Bidang SDK Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, 31 Agustus 2025

Tabel 2.3 menyajikan jumlah tenaga keperawatan dan kebidanan yang ada di Kota Balikpapan. Terdapat 2.456 tenaga keperawatan dan 491 tenaga kebidanan. Sebesar 84,45% (2.074 dari 2.456 perawat) dan 44,60% (219 dari 491 bidan) bekerja di rumah sakit. Hanya 6,15% (151 dari 2.456 perawat) dan 31,77% (156 dari 491 bidan) yang bertugas di UPTD Dinas Kesehatan (27 Puskesmas, Labkesda, IFK dan BL ABK) . Terdapat ketimpangan yang signifikan dalam jumlah tenaga antar Puskesmas baik perawat maupun bidan disebabkan antara lain karena terdapat 7 Puskesmas yang membuka layanan 24 jam.

4. Tenaga Kefarmasiaan

Tabel 2.4 Jumlah Tenaga Kefarmasiaan di Fasilitas Kesehatan Tahun 2025

No.	Nama Faskes	Apoteker			Tenaga Teknik Kefarmasian			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Puskesmas Graha Indah	0	2	2	0	3	3	0	5	5
2	Puskesmas Sepinggan	0	1	1	0	4	4	0	5	5
3	Puskesmas Damai	1	0	1	1	2	3	2	2	4
4	Puskesmas Klandasan Ilir	0	2	2	0	5	5	0	7	7
5	Puskesmas Prapatan	0	1	1	0	2	2	0	3	3
6	Puskesmas Gunung Bahagia	0	1	1	0	2	2	0	3	3
7	Puskesmas Telaga Sari	0	1	1	0	2	2	0	3	3
8	Puskesmas Manggar	0	1	1	0	2	2	0	3	3
9	Puskesmas Lamaru	1	0	1	1	1	2	2	1	3
10	Puskesmas Teritip	0	1	1	0	2	2	0	3	3
11	Puskesmas Manggar Baru	1	0	1	1	3	4	2	3	5
12	Puskesmas Batu Ampar	0	1	1	0	2	2	0	3	3
13	Puskesmas Karang Joang	0	1	1	0	5	5	0	6	6
14	Puskesmas Gunung Samarinda	0	1	1	0	2	2	0	3	3



No.	Nama Faskes	Apoteker			Tenaga Teknik Kefarmasian			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
15	Puskesmas Muara Rapak	0	1	1	1	1	2	1	2	3
16	Puskesmas Mekar Sari	0	1	1	0	4	4	0	5	5
17	Puskesmas Karang Jati	0	1	1	0	2	2	0	3	3
18	Puskesmas Gunung Sari Ilir	0	1	1	0	2	2	0	3	3
19	Puskesmas Karang Rejo	0	1	1	0	2	2	0	3	3
20	Puskesmas Sumber Rejo	0	1	1	0	2	2	0	3	3
21	Puskesmas Gunung Sari Ulu	0	1	1	1	1	2	1	2	3
22	Puskesmas Baru Ulu	0	1	1	0	2	2	0	3	3
23	Puskesmas Kariangau	0	1	1	0	5	5	0	6	6
24	Puskesmas Baru Ilir	0	1	1	0	2	2	0	3	3
25	Puskesmas Margo Mulyo	0	1	1	0	2	2	0	3	3
26	Puskesmas Baru Tengah	0	1	1	0	2	2	0	3	3
27	Puskesmas Margasari	0	1	1	0	2	2	0	3	3
28	LABKESDA	0	0	0	0	1	1	0	1	1
29	IFK	0	2	2	1	4	5	1	6	7
30	BL ABK	0	1	1	0	0	0	0	1	1
31	RS Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo	5	23	28	32	60	92	37	83	120
32	RS Pertamina Balikpapan	3	7	10	0	0	0	3	7	10
33	RS Tk. II Dr. R. Hardjanto	1	1	2	0	0	0	1	1	2
34	RS Restu Ibu	1	8	9	0	0	0	1	8	9
35	RS Ibu dan Anak Sayang Ibu	0	3	3	1	9	10	1	12	13
36	RS Bhayangkara Balikpapan	0	5	5	1	2	3	1	7	8
37	RS Medika Utama Permata	0	2	2	0	0	0	0	2	2
38	RS Siloam Hospitals Balikpapan	1	5	6	0	0	0	1	5	6
39	RS Umum Balikpapan Baru	1	2	3	0	1	1	1	3	4
40	RS Umum Tk. IV Lanud Balikpapan	1	0	1	0	0	0	1	0	1
41	RS Umum Daerah Beriman	2	10	12	2	17	19	4	27	31
42	RS Khusus Mata SMEC Balikpapan	0	3	3	0	0	0	0	3	3
43	RS Ibu Anak Asih Balikpapan	1	2	3	0	0	0	1	2	3
44	RS Hermina Balikpapan	0	7	7	0	0	0	0	7	7
45	RS Medika Utama Manggar	0	2	2	0	0	0	0	2	2

No.	Nama Faskes	Apoteker			Tenaga Teknik Kefarmasian			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
46	Rumah Sakit Pertamina Panorama Balikpapan	2	1	3	0	0	0	2	1	3
47	Fasilitas Kesehatan Lainnya	7	72	79	5	24	29	12	96	108
Jumlah		28	182	210	47	184	231	75	366	441
Rasio Terhadap 100.000 Penduduk				27,04			29,74			56,77

Sumber: Bidang SDK Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, 31 Agustus 2025

Tabel 2.4 memperlihatkan jumlah tenaga kefarmasian yang terdiri dari tenaga teknis kefarmasian dan apoteker, dengan total 441 orang. Rasio terhadap 100.000 penduduk sebesar 56,77 (0,57 terhadap 1.000 penduduk) cukup tinggi tetapi masih sangat jauh dari kebutuhan ideal berdasarkan rasio 1:1.000 penduduk. Kesenjangan ini memerlukan pendekatan komprehensif dan berjenjang melalui perencanaan jangka panjang, optimalisasi sumber daya existing, dan inovasi dalam pemberian layanan. Penyebaran tenaga kefarmasian juga masih timpang. Sebagian besar tenaga yang ada (sekitar 50,79%) terkonsentrasi di rumah sakit, sementara Puskesmas yang merupakan ujung tombak layanan primer sekitar 22,67%.

5. Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, dan Gizi

Tabel 2.5 Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, dan Gizi Tahun 2025

No.	Nama Faskes	Tenaga Kesehatan Masyarakat			Tenaga Kesehatan Lingkungan			Tenaga Gizi		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Puskesmas Graha Indah	0	1	1	0	1	1	0	1	1
2	Puskesmas Sepinggian	0	1	1	0	1	1	0	2	2
3	Puskesmas Damai	0	1	1	0	1	1	0	2	2
4	Puskesmas Klandasan Ilir	0	2	2	0	1	1	0	0	0
5	Puskesmas Prapatan	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	Puskesmas Gunung Bahagia	0	1	1	0	1	1	0	1	1
7	Puskesmas Telaga Sari	0	1	1	0	1	1	1	0	1
8	Puskesmas Manggar	0	1	1	0	0	0	0	1	1
9	Puskesmas Lamaru	0	1	1	0	1	1	0	1	1
10	Puskesmas Teritip	0	1	1	1	0	1	0	1	1

No.	Nama Faskes	Tenaga Kesehatan Masyarakat			Tenaga Kesehatan Lingkungan			Tenaga Gizi		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
11	Puskesmas Manggar Baru	0	1	1	0	1	1	0	2	2
12	Puskesmas Batu Ampar	0	1	1	0	1	1	0	1	1
13	Puskesmas Karang Joang	1	1	2	1	0	1	1	0	1
14	Puskesmas Gunung Samarinda	0	1	1	0	1	1	0	1	1
15	Puskesmas Muara Rapak	0	1	1	0	1	1	0	1	1
16	Puskesmas Mekar Sari	0	1	1	0	1	1	0	1	1
17	Puskesmas Karang Jati	0	0	0	0	1	1	0	1	1
18	Puskesmas Gunung Sari Ilir	0	1	1	0	0	0	0	1	1
19	Puskesmas Karang Rejo	0	1	1	0	1	1	0	1	1
20	Puskesmas Sumber Rejo	0	1	1	0	1	1	1	0	1
21	Puskesmas Gunung Sari Ulu	1	0	1	0	1	1	0	1	1
22	Puskesmas Baru Ulu	0	1	1	0	1	1	0	1	1
23	Puskesmas Kariangau	1	0	1	0	1	1	0	1	1
24	Puskesmas Baru Ilir	0	1	1	0	0	0	0	0	0
25	Puskesmas Margo Mulyo	0	1	1	0	1	1	0	1	1
26	Puskesmas Baru Tengah	0	1	1	1	0	1	0	1	1
27	Puskesmas Margasari	0	1	1	0	1	1	0	0	0
28	LABKESDA	0	1	1	1	0	1	0	0	0
29	IFK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	BL ABK	0	1	1	0	0	0	0	1	1
31	RS Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo	5	4	9	2	3	5	6	12	18
32	RS Pertamina Balikpapan	0	1	1	1	0	1	0	4	4
33	RS Tk. II Dr. R. Hardjanto	0	0	0	0	0	0	0	2	2
34	RS Restu Ibu	0	0	0	0	0	0	0	3	3
35	RS Ibu dan Anak Sayang Ibu	0	2	2	0	1	1	0	2	2
36	RS Bhayangkara Balikpapan	0	1	1	0	0	0	0	2	2
37	RS Medika Utama Permata	0	0	0	0	0	0	1	0	1
38	RS Siloam Hospitals Balikpapan	0	0	0	0	0	0	0	2	2
39	RS Umum Balikpapan Baru	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40	RS Umum Tk. IV Lanud Balikpapan	0	1	1	0	0	0	0	1	1
41	RS Umum Daerah Beriman	0	3	3	1	2	3	0	6	6

No.	Nama Faskes	Tenaga Kesehatan Masyarakat			Tenaga Kesehatan Lingkungan			Tenaga Gizi		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
42	RS Khusus Mata SMEC Balikpapan	0	0	0	0	1	1	0	1	1
43	RS Ibu Anak Asih Balikpapan	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44	RS Hermina Balikpapan	0	0	0	2	0	2	0	2	2
45	RS Medika Utama Manggar	0	0	0	0	0	0	0	1	1
46	Rumah Sakit Pertamina Panorama Balikpapan	0	0	0	1	0	1	0	2	2
47	Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	11	12	0	1	1	0	2	2
Jumlah		9	50	59	11	29	40	10	69	79
Rasio Terhadap 100.000 Penduduk				7,60			5,15			10,17

Sumber: Bidang SDK Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, 31 Agustus 2025

Tabel 2.5 menggambarkan tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, dan gizi. Total terdapat 59 tenaga kesehatan masyarakat, 40 tenaga kesehatan lingkungan, dan 79 tenaga gizi. Terdapat keterbatasan tenaga di Puskesmas diantaranya :

- Tenaga Kesehatan Masyarakat : 27 Puskesmas hanya didukung oleh 28 orang tenaga kesmas (rata-rata 1 orang/Puskesmas). Bahkan ada 1 Puskesmas yang tidak memiliki Tenaga Kesehatan Masyarakat (Puskesmas Karang Jati).
- Tenaga Kesehatan Lingkungan: 27 Puskesmas hanya didukung oleh 24 orang Tenaga Kesehatan Lingkungan. 3 Puskesmas (Manggar, Gunung Sari Ilir, Baru Ilir) tidak memiliki tenaga kesling.
- Tenaga Gizi: 27 Puskesmas didukung oleh 27 orang tenaga gizi, tetapi ada 3 Puskesmas (Puskesmas Klandasan Ilir, Puskesmas Baru Ilir, dan Puskesmas Margasari) tidak memiliki tenaga gizi.

Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa masih ada Rumah Sakit yang belum memiliki Tenaga Kesehatan Masyarakat dan Tenaga Kesehatan Lingkungan.

### 6. Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik dan Teknik Biomedika Lainnya

Tabel 2.6 Jumlah Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik dan Teknik Biomedika Lainnya

No.	Nama Faskes	ATLM			Tekhnik Biomedika Lainnya			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Puskesmas Graha Indah	0	2	2	0	0	0	0	2	2

No.	Nama Faskes	ATLM			Tekhnik Biomedika Lainnya			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
2	Puskesmas Sepinggan	0	2	2	0	0	0	0	2	2
3	Puskesmas Damai	0	1	1	0	0	0	0	1	1
4	Puskesmas Klandasan Ilir	0	2	2	0	0	0	0	2	2
5	Puskesmas Prapatan	1	0	1	0	0	0	1	0	1
6	Puskesmas Gunung Bahagia	1	0	1	0	0	0	1	0	1
7	Puskesmas Telaga Sari	0	1	1	0	0	0	0	1	1
8	Puskesmas Manggar	0	1	1	0	0	0	0	1	1
9	Puskesmas Lamaru	0	1	1	0	0	0	0	1	1
10	Puskesmas Teritip	0	1	1	0	0	0	0	1	1
11	Puskesmas Manggar Baru	0	1	1	0	0	0	0	1	1
12	Puskesmas Batu Ampar	0	1	1	0	0	0	0	1	1
13	Puskesmas Karang Joang	0	1	1	0	0	0	0	1	1
14	Puskesmas Gunung Samarinda	0	2	2	0	0	0	0	2	2
15	Puskesmas Muara Rapak	0	1	1	0	0	0	0	1	1
16	Puskesmas Mekar Sari	0	1	1	0	0	0	0	1	1
17	Puskesmas Karang Jati	0	1	1	0	0	0	0	1	1
18	Puskesmas Gunung Sari Ilir	0	1	1	0	0	0	0	1	1
19	Puskesmas Karang Rejo	0	2	2	0	0	0	0	2	2
20	Puskesmas Sumber Rejo	0	1	1	0	0	0	0	1	1
21	Puskesmas Gunung Sari Ulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Puskesmas Baru Ulu	0	1	1	0	0	0	0	1	1
23	Puskesmas Kariangau	0	1	1	0	0	0	0	1	1
24	Puskesmas Baru Ilir	0	1	1	0	0	0	0	1	1
25	Puskesmas Margo Mulyo	0	1	1	0	0	0	0	1	1
26	Puskesmas Baru Tengah	0	1	1	0	0	0	0	1	1
27	Puskesmas Margasari	0	1	1	0	0	0	0	1	1
28	LABKESDA	4	12	16	0	0	0	4	12	16
29	IFK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	BL ABK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	RS Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo	13	33	46	25	40	65	38	73	111
32	RS Pertamina Balikpapan	12	13	25	0	0	0	12	13	25
33	RS Tk. II Dr. R. Hardjanto	1	9	10	1	1	2	2	10	12

No.	Nama Faskes	ATLM			Tekhnik Biomedika Lainnya			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
34	RS Restu Ibu	3	13	16	0	0	0	3	13	16
35	RS Ibu dan Anak Sayang Ibu	0	8	8	0	10	10	0	18	18
36	RS Bhayangkara Balikpapan	1	9	10	2	0	2	3	9	12
37	RS Medika Utama Permata	0	3	3	0	0	0	0	3	3
38	RS Siloam Hospitals Balikpapan	9	7	16	0	0	0	9	7	16
39	RS Umum Balikpapan Baru	1	7	8	0	0	0	1	7	8
40	RS Umum Tk. IV Lanud Balikpapan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	RS Umum Daerah Beriman	7	9	16	9	15	24	16	24	40
42	RS Khusus Mata SMEC Balikpapan	0	1	1	0	0	0	0	1	1
43	RS Ibu Anak Asih Balikpapan	0	8	8	0	0	0	0	8	8
44	RS Hermina Balikpapan	0	3	3	0	0	0	0	3	3
45	RS Medika Utama Manggar	3	2	5	0	0	0	3	2	5
46	Rumah Sakit Pertamina Panorama Balikpapan			0			0	0	0	0
47	Fasilitas Kesehatan Lainnya	9	51	60	10	8	18	19	59	78
Jumlah		65	217	282	47	74	121	112	291	403
Rasio Terhadap 100.000 Penduduk				36,30			15,58			51,88

Sumber: Bidang SDK Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, 31 Agustus 2025

Tabel 2.6 menggambarkan Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik dan Tenaga Biomedika Lainnya. Total terdapat 403 Tenaga( Ahli Teknologi Laboratorium Medik 282 dan 121 Tenaga Biomedika Lainnya. Untuk tenaga ATLM sudah terpenuhi dengan rasio 36,30 per 100.000 penduduk (0,363 per 1.000 penduduk) dari standar 0,354 per 1.000 penduduk. Sedangkan untuk tenaga Teknik Biomedika lainnya baru terpenuhi dengan rasio 15,58 per 100.000 penduduk (0,16 per 1.000 penduduk) dari standar 0,18 per 1.000 penduduk. Dari distribusi tenaga yang ada terdapat kesenjangan distribusi tenaga yang terkonsentrasi di Rumah Sakit, yaitu tenaga ATLM sebanyak 62,06% dan Tenaga Biomedika Lainnya sebanyak 85,12%. Sedangkan tenaga ATLM bertugas di Puskesmas hanya 10,99%. Rata-rata Puskesmas hanya memiliki 1 orang tenaga laboratorium dan ada 1 Puskesmas (Puskesmas Gunung Sari Ulu) yang tidak memiliki tenaga laboratorium.



No.	Nama Faskes	Perekam Medis dan Informasi Kesehatan			Terapis Gigi dan Mulut			TOTAL		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
30	BL ABK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	RS Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo	5	14	19	12	20	32	17	34	51
32	RS Pertamina Balikpapan	0	3	3	0	0	0	0	3	3
33	RS Tk. II Dr. R. Hardjanto	0	3	3	0	1	1	0	4	4
34	RS Restu Ibu	1	6	7	0	0	0	1	6	7
35	RS Ibu dan Anak Sayang Ibu	0	2	2	0	2	2	0	4	4
36	RS Bhayangkara Balikpapan	0	1	1	0	0	0	0	1	1
37	RS Medika Utama Permata	1	1	2	0	0	0	1	1	2
38	RS Siloam Hospitals Balikpapan	1	4	5	0	0	0	1	4	5
39	RS Umum Balikpapan Baru	1	4	5	0	0	0	1	4	5
40	RS Umum Tk. IV Lanud Balikpapan	0	1	1	0	0	0	0	1	1
41	RS Umum Daerah Beriman	2	4	6	6	9	15	8	13	21
42	RS Khusus Mata SMEC Balikpapan	0	4	4	0	0	0	0	4	4
43	RS Ibu Anak Asih Balikpapan	0	3	3	0	0	0	0	3	3
44	RS Hermina Balikpapan	1	4	5	0	0	0	1	4	5
45	RS Medika Utama Manggar	1	0	1	1	0	1	2	0	2
46	Rumah Sakit Pertamina Panorama Balikpapan	0	2	2	0	0	0	0	2	2
47	Fasilitas Kesehatan Lainnya	2	4	6	2	5	7	4	9	13
Jumlah		15	71	86	26	56	82	41	127	168
Rasio Per 100.000 Penduduk				11,07			10,56			21,63

Sumber: Bidang SDK Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, 31 Agustus 2025

Tabel 2.7 menggambarkan Tenaga Ketekhnisian Medis. Total terdapat 86 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dan 82 Terapis Gigi dan Mulut. Dari 27 Puskesmas hanya 11 Puskesmas yang memiliki tenaga Perekam Medis. Dari data diatas juga menunjukkan 4 Puskesmas (Graha Indah, Teritip, Gunung Samarinda, dan Gunung Sari Ulu) tidak memiliki satupun tenaga dari kedua kategori ini. Kesenjangan yang sangat mencolok antara Puskesmas dan Rumah Sakit juga terjadi dalam hal ketersediaan tenaga.



Sebanyak 71,43% tenaga (120 dari 168 orang) terkonsentrasi di rumah sakit.

#### 8. Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan

**Tabel 2.8 Jumlah Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan**

No.	Nama Faskes	Tenaga Penunjang						Total		
		Struktural			Dukungan Manajemen					
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Puskesmas Graha Indah	0	0	0	3	2	5	3	2	5
2	Puskesmas Sepinggan	0	1	1	5	13	18	5	14	19
3	Puskesmas Damai	0	1	1	3	4	7	3	5	8
4	Puskesmas Klandasan Ilir	1	0	1	4	9	13	5	9	14
5	Puskesmas Prapatan	0	2	2	2	4	6	2	6	8
6	Puskesmas Gunung Bahagia	0	1	1	1	4	5	1	5	6
7	Puskesmas Telaga Sari	0	1	1	0	4	4	0	5	5
8	Puskesmas Manggar	0	1	1	2	7	9	2	8	10
9	Puskesmas Lamaru	1	0	1	1	3	4	2	3	5
10	Puskesmas Teritip	1	0	1	1	4	5	2	4	6
11	Puskesmas Manggar Baru	0	1	1	4	8	12	4	9	13
12	Puskesmas Batu Ampar	0	1	1	3	3	6	3	4	7
13	Puskesmas Karang Joang	1	0	1	3	10	13	4	10	14
14	Puskesmas Gunung Samarinda	0	1	1	2	4	6	2	5	7
15	Puskesmas Muara Rapak	0	1	1	1	5	6	1	6	7
16	Puskesmas Mekar Sari	0	1	1	1	7	8	1	8	9
17	Puskesmas Karang Jati	0	1	1	0	5	5	0	6	6
18	Puskesmas Gunung Sari Ilir	0	1	1	2	3	5	2	4	6
19	Puskesmas Karang Rejo	0	0	0	3	3	6	3	3	6
20	Puskesmas Sumber Rejo	0	1	1	4	4	8	4	5	9
21	Puskesmas Gunung Sari Ulu	0	1	1	2	1	3	2	2	4
22	Puskesmas Baru Ulu	1	0	1	3	7	10	4	7	11
23	Puskesmas Kariangau	0	1	1	1	4	5	1	5	6
24	Puskesmas Baru Ilir	0	1	1	0	6	6	0	7	7
25	Puskesmas Margo Mulyo	0	1	1	1	5	6	1	6	7
26	Puskesmas Baru Tengah	0	1	1	3	6	9	3	7	10
27	Puskesmas Margasari	0	1	1	4	6	10	4	7	11
28	LABKESDA	1	0	1	1	1	2	2	1	3
29	IFK	0	1	1	4	0	4	4	1	5

No.	Nama Faskes	Tenaga Penunjang						Total		
		Struktural			Dukungan Manajemen					
		L 0	P 1	L+P 1	L 1	P 1	L+P 2	L 1	P 2	L+P 3
30	BL ABK	0	1	1	1	1	2	1	2	3
31	RS Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo	4	4	8	210	133	343	214	137	351
32	RS Pertamina Balikpapan	1	7	8	218	144	362	219	151	370
33	RS Tk. II Dr. R. Hardjanto	0	0	0	51	83	134	51	83	134
34	RS Restu Ibu	1	1	2	71	100	171	72	101	173
35	RS Ibu dan Anak Sayang Ibu	0	3	3	7	29	36	7	32	39
36	RS Bhayangkara Balikpapan	2	8	10	33	24	57	35	32	67
37	RS Medika Utama Permata	0	0	0	19	17	36	19	17	36
38	RS Siloam Hospitals Balikpapan	2	0	2	31	84	115	33	84	117
39	RS Umum Balikpapan Baru	1	1	2	38	21	59	39	22	61
40	RS Umum Tk. IV Lanud Balikpapan	0	0	0	3	0	3	3	0	3
41	RS Umum Daerah Beriman	4	7	11	41	48	89	45	55	100
42	RS Khusus Mata SMEC Balikpapan	0	0	0	8	6	14	8	6	14
43	RS Ibu Anak Asih Balikpapan	0	0	0	10	13	23	10	13	23
44	RS Hermina Balikpapan	3	1	4	19	49	68	22	50	72
45	RS Medika Utama Manggar	3	1	4	15	14	29	18	15	33
46	Rumah Sakit Pertamina Panorama Balikpapan	4	0	4	9	16	25	13	16	29
47	Fasilitas Kesehatan Lainnya	20	6	26	207	359	566	227	365	592
Jumlah		51	62	113	1055	1283	2338	1106	1345	2451
Rasio Terhadap 100.000 Penduduk				14,55			301,00			315,54

Sumber: Bidang SDK Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, 31 Agustus 2025

Tabel 2.8 menunjukkan jumlah tenaga penunjang/pelaksana nonmedis seperti pejabat struktural dan tenaga dukungan manajemen. Total terdapat 113 pejabat struktural dan 2338 tenaga dukungan manajemen. Data menunjukkan pola distribusi yang tidak merata. Sebanyak 66,18% tenaga penunjang (1.622 dari 2.451 orang) terkonsentrasi di rumah sakit. Hanya 9,67% (237 orang) tenaga penunjang yang bertugas di 30 UPTD Dinas Kesehatan, sedangkan 24,15% (592 orang) tersebar di Fasilitas Kesehatan Lainnya.

**b. Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan**

Sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kota Balikpapan telah tersebar di seluruh wilayah Kecamatan, termasuk pelayanan kesehatan khusus bagi ibu dan anak. Kecamatan yang paling banyak sarana pelayanannya adalah Kecamatan Balikpapan Selatan dan Tengah, dimana sarana pelayanan tersebut mudah diakses oleh seluruh penduduk dengan menggunakan transportasi darat.

Pelayanan kebutuhan darah dilayani oleh PMI yang lokasinya di Kecamatan Balikpapan Kota. Jarak terdekat PMI dengan Rumah Sakit adalah 1 km sedangkan jarak terjauh 15 Km yaitu dengan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo.

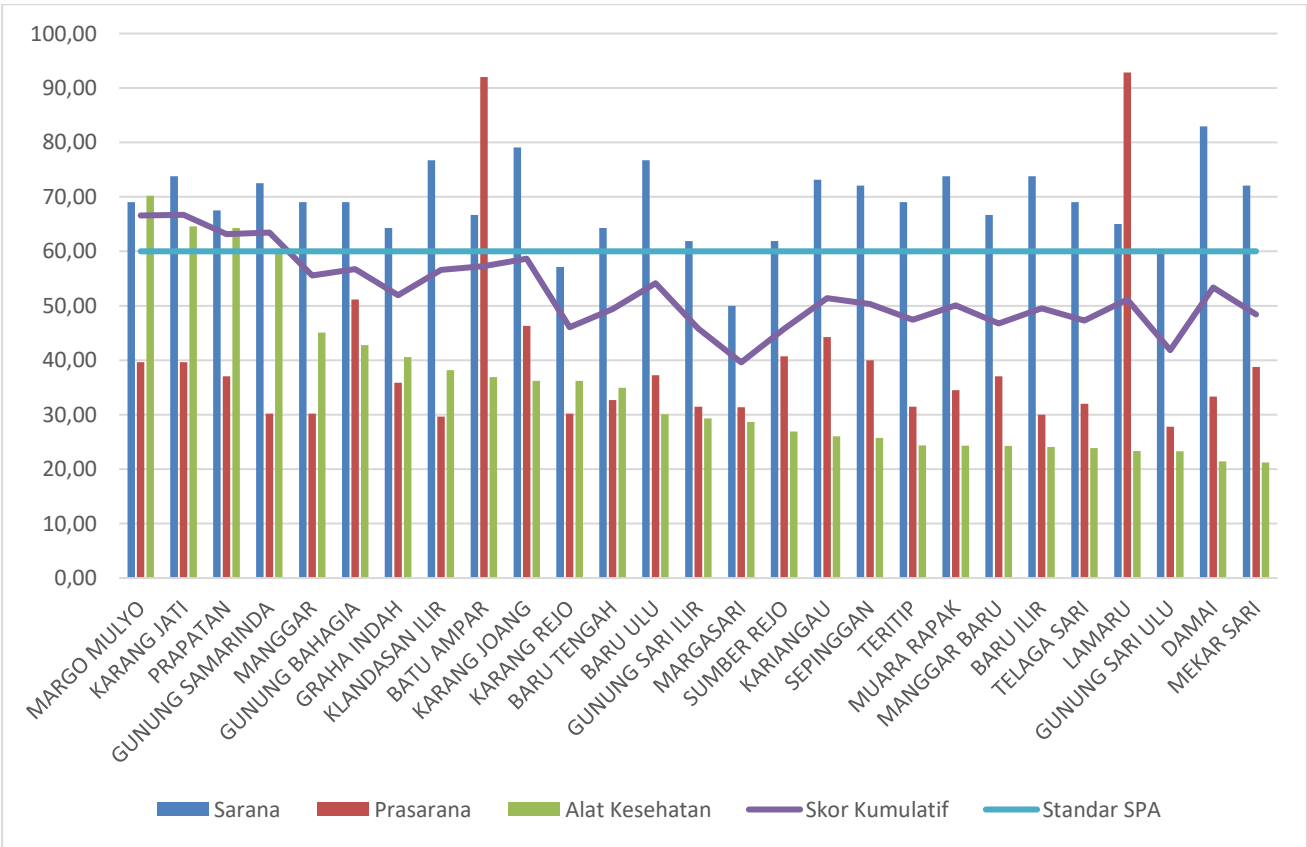
**Tabel 2.9 Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2025**

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Puskesmas	27	Puskesmas perkotaan non rawat inap berdasarkan SK Walikota Nomor 188.45-407/2023
2	Puskesmas Mampu Poned	7	SK Walikota No.188.45-763/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Penunjukan Puskesmas di wilayah Kota Balikpapan Sebagai Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED).
3	Puskesmas Pembantu	14	
4	Polindes	0	
5	Pos Kesehatan Desa	0	
6	RSUD Kab/Kota	1	RSUD Beriman Balikpapan
7	RS Umum Pemerintah lainnya	5	RS Kanujoso Djatiwibowo, RS Tk. II Dr. R. Hardjanto, RS Bhayangkara, RS Lanud Dhomber, RSUD Beriman
8	RS Khusus Bersalin Pemerintah	1	RS Ibu dan Anak Sayang Ibu
9	RS Umum Swasta	7	RSPB, RS Restu Ibu, RS Siloam, RS Hermina, RS Medika Utama, RS Pertamina Panorama, RS Balikpapan Baru
10	RS Khusus Swasta	3	RSIA Medika Utama Permata, & RSIA Asih, RS SMEC
12	Klinik	114	
13	Puskesmas Keliling	0	
14	Praktek Dokter Umum	26	
15	Praktek Dokter Spesialis	11	
16	Praktek Dokter Gigi	52	
17	Praktek Bidan	21	
18	Apotek	113	

19	Toko Obat	14	
20	Laboratorium	9	
21	Pedagang Besar Farmasi	18	
22	Toko Alkes	66	
23	Penyalur Alat Kesehatan	38	

Sumber: Bidang SDK Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

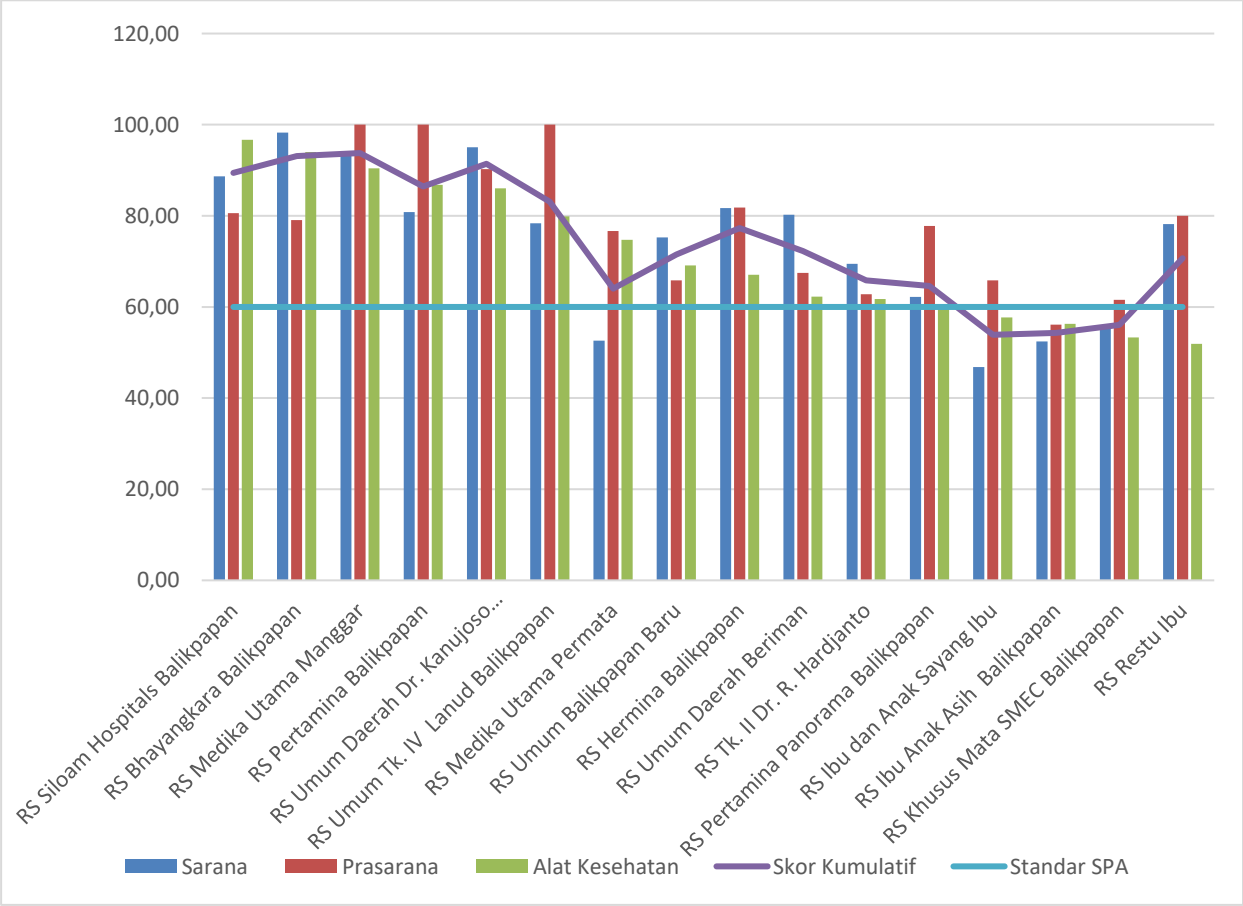
Grafik 2. Kelengkapan Sarana, Prasarana, Dan Alat Kesehatan Puskesmas Se-Kota Balikpapan Tahun 2025



Sumber : Aplikasi ASPAK

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kelengkapan fasilitas Puskesmas di Kota Balikpapan per Oktober 2025, teridentifikasi bahwa tingkat kesiapan sarana dan prasarana kesehatan masih beragam dengan nilai kumulatif berkisar antara 39,61 hingga 66,70. Secara umum, terdapat 15 dari 27 Puskesmas yang berada di bawah nilai rata-rata, dengan aspek alat kesehatan menjadi komponen paling kritis yang memerlukan perhatian khusus. Puskesmas Margasari, Gunung Sari Ulu, dan Karang Rejo tercatat sebagai lokasi prioritas yang memerlukan intervensi segera mengingat capaian ketiga aspek penilaiannya masih di bawah standar. Sementara itu, Puskesmas Karang Jati, Margomulyo, dan Prapatan menunjukkan kinerja kelengkapan yang optimal dan dapat dijadikan sebagai rujukan best practice. Berdasarkan grafik diatas, diperlukan penyusunan program percepatan dan pemerataan penyediaan alat kesehatan serta peningkatan kualitas prasarana secara strategis dan terukur untuk mendukung tercapainya standar minimal layanan kesehatan.

Grafik 2. Kelengkapan Sarana, Prasarana, Dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Se-Kota Balikpapan Tahun 2025



Sumber : Aplikasi ASPAK

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap data kelengkapan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) rumah sakit di Kota Balikpapan, secara umum seluruh rumah sakit telah memenuhi standar minimal kelengkapan SPA sebesar 60%. Terdapat variasi capaian yang signifikan antara fasilitas kesehatan dengan skor kumulatif tertinggi sebesar 93,77% pada RS Medika Utama Manggar dan terendah sebesar 53,89% pada RS Ibu dan Anak Sayang Ibu, yang mengindikasikan adanya kesenjangan dalam standar pelayanan kesehatan di tingkat rumah sakit.

Dari aspek komponen penilaian, teridentifikasi bahwa RS Medika Utama Manggar dan RS Bhayangkara Balikpapan menunjukkan konsistensi yang optimal dengan pencapaian di atas 90% pada seluruh aspek penilaian. Sementara itu, RS Siloam Hospital Balikpapan mencatat kinerja luar biasa pada komponen alat kesehatan dengan capaian 96,69%, menjadikannya benchmark untuk rumah sakit lainnya. Namun, masih terdapat rumah sakit yang memerlukan perhatian khusus, khususnya RS Ibu dan Anak Sayang Ibu dan RS Ibu Anak Asih Balikpapan yang berada pada kategori rentang 53-55%.

Temuan kritis yang perlu menjadi perhatian adalah adanya ketidakseimbangan

antara ketersediaan prasarana dengan kelengkapan alat kesehatan di beberapa rumah sakit. Meskipun RS Medika Utama Manggar, RS Pertamina Balikpapan, dan RS Lanud Balikpapan mencapai nilai maksimal 100% untuk prasarana, namun capaian alat kesehatan mereka berada pada kisaran 79-90%. Demikian pula RS Restu Ibu yang memiliki prasarana 80% namun hanya mencapai 51,92% untuk alat kesehatan, mengindikasikan kebutuhan optimalisasi yang lebih proporsional.

Berdasarkan analisis mendalam, diperlukan langkah strategis berupa intervensi terfokus pada rumah sakit dengan skor di bawah 70%, khususnya pada komponen alat kesehatan yang menjadi aspek paling kritis. Program revitalisasi alat kesehatan perlu diprioritaskan pada RS Khusus Mata SMEC, RS Ibu Anak Asih, dan RS Ibu dan Anak Sayang Ibu, dengan memperhatikan karakteristik layanan spesialisasi masing-masing rumah sakit. Selain itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dengan manajemen rumah sakit swasta untuk mempercepat pemerataan fasilitas kesehatan.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan akan memperkuat mekanisme pembinaan dan supervisi berkala. Komitmen ini sejalan dengan visi pembangunan kesehatan daerah dan tujuan Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kota Balikpapan, sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Balikpapan.

c. Anggaran Kesehatan

Alokasi anggaran kesehatan khususnya bersumber dari APBD Kota Balikpapan tahun 2025 sebesar 653.714.855.707,00, dengan proporsi sebesar 14,22 % terhadap APBD Kota Balikpapan.

**Tabel 2.10 Proporsi Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2021-2025**

Tahun	APBD Kesehatan	APBD Kota	% APBD Kesehatan terhadap APBD Kota (%)
2021	296.391.600.087,00	2.857.878.273.932,00	14.86
2022	419.529.045.874,61	3.300.722.216.212,00	12,70
2023	547.871.709.538,00	4.828.045.693.864,00	11,35
2024	699.834.637.848,00	4.545.984.209.715,36	15,40
2025	653.714.855.707,00	4.598.054.259.629,00	14,22

Sumber :

Tabel di atas menggambarkan peningkatan anggaran kesehatan yang konsisten dan mencerminkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Balikpapan terhadap pembangunan sektor kesehatan yaitu minimal 10% dari anggaran APBD Kota Balikpapan.

Alokasi anggaran untuk Dinas Kesehatan Kota Balikpapan pada periode 2021-2025 menunjukkan perkembangan yang dinamis. Secara nominal, anggaran kesehatan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, dari Rp 296,39 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp 653,71 miliar pada tahun 2025, atau mengalami lebih dari dua kali lipat kenaikan.

Namun, ketika dilihat dari proporsinya terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota, trennya tidak selalu linear. Proporsi anggaran kesehatan sempat mengalami penurunan pada tahun 2022 (12,70%) dan 2023 (11,35%), menandakan adanya percepatan pembangunan di sektor lain. Titik balik yang penting terjadi pada tahun 2024, di mana Pemerintah Kota menunjukkan komitmen luar biasa dengan mengalokasikan 15,40% dari total APBD untuk kesehatan, nilai tertinggi dalam kurun waktu lima tahun, dengan nominal mencapai hampir Rp 700 miliar.

Pada tahun 2025, meskipun terjadi penurunan kecil dalam nominal dan proporsi (menjadi 14,22%), alokasi untuk kesehatan tetap berada pada level yang sangat tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum 2024. Data ini merefleksikan bahwa sektor kesehatan telah dan akan terus menjadi prioritas strategis dalam pembangunan Kota Balikpapan, sejalan dengan peningkatan kebutuhan dan tuntutan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Alokasi Anggaran Kesehatan di Kota Balikpapan dalam bentuk anggaran rutin dan kegiatan operasional di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas dengan realisasi anggaran sebagai berikut:

**Tabel 2.11 Realisasi Anggaran Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

NO	TAHUN	PAGU	REALISASI	% REALISASI
1	2020	107.336.381.721,00	86.176.159.492,00	80,89%
2	2021	296.391.600.087,00	219.074.078.670,00	73,91%
3	2022	308.047.174.783,00	274.076.712.624,97	88,97%
4	2023	414.800.650.300,00	319.864.228.976,16	77,11%
5	2024	672.972.686.848,00	491.730.166.918,18	73,07%

Sumber: Sub.Bag Keuangan Dinkes Kota Balikpapan

Pagu Anggaran Dinas Kesehatan menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan dan progresif dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Terjadi peningkatan pagu sebesar lebih dari 527% dari pagu semula sebesar Rp107.336.381.721,00 pada Tahun Anggaran 2020 menjadi sebesar Rp672.972.686.848,00 pada Tahun Anggaran 2024. Lonjakan pagu yang paling substansial terjadi pada Tahun 2021, yang merepresentasikan respon fiskal

Pemerintah Kota terhadap kondisi pandemi dan sekaligus menjadi bentuk komitmen untuk transformasi pembangunan sektor kesehatan. Meskipun pagu meningkat drastis, capaian realisasi dan persentase penyerapannya menunjukkan kinerja yang fluktuatif dan terdapat tantangan dalam penyerapan anggaran. Pada tahun 2022 realisasi anggaran sebesar 88,9% merupakan kinerja terbaik dalam lima tahun. Hal ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang meningkat dalam perencanaan, proses dan eksekusi program/kegiatan/sub kegiatan. Pada tahun 2023 dan 2024 realisasi kembali turun ke level 77,11% dan 73,07%, hal ini disebabkan adanya pekerjaan fisik pembangunan rumah sakit yang terkendala sehingga mempengaruhi realisasi.



2.1.e Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Tabel 2.12 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun								
			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indikator Kesehatan	0,8383	0,8385	0,843	100,54%	0,8388	0,8315	99,13%	0,8391	0,8595	102,43%
2	Angka Harapan Hidup	74,49	74,5	74,68	100,24%	74,52	75,64	101,50%	74,54	75,87	101,78%
3	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	27	31,19	115,52%	28,75	NA	#VALUE!	30,50	NA	#VALUE!
4	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,23%	0,23%	0,23%	100,00%	0,24%	0,40%	166,67%	0,26%	0,28%	106,42%
5	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	75%	100%	93%	93,33%	100%	100%	100,00%	100%	93,75%	93,75%
6	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	93,92	100%	96,64%	96,64%	100%	99,03%	99,03%	100%	100,20%	100,20%
7	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	93,22	100%	96,15%	96,15%	100%	99,04%	99,04%	100%	100,31%	100,31%
8	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,09	100%	100%	100,00%	100%	103,05%	103,05%	100%	104,06%	104,06%
9	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	61,39	70%	99,16%	141,66%	80%	98,22%	122,78%	100%	105,82%	105,82%
10	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	71,45	100%	100%	100,00%	100%	99,79%	99,79%	100%	119,99%	119,99%
11	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	30,01	50%	76,72%	153,44%	55%	88,77%	161,40%	100%	100%	100,00%
12	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	27,99	60%	60,46%	100,77%	70%	96,01%	137,16%	80%	101,39%	126,74%
13	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20,21	30%	75,63%	252,10%	35%	98,69%	281,97%	100%	100%	100,00%
14	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	51,10	55%	100%	181,82%	60%	110,72%	184,53%	100%	115,39%	115,39%

No.	Indikator		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun									
				Tahun 2020	2022			2023			2024		
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
15	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		75,24	80%	85,94%	107,43%	85%	95,70%	112,59%	100%	107,66%	107,66%	
16	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		40,3	55%	86,12%	156,58%	65%	108,95%	167,62%	75%	118,76%	158,35%	
17	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		58,39	100,00%	88,44%	88,44%	100%	102,90%	102,90%	100%	118,47%	118,47%	
18	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana,prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	14	14	14	100,00%	14	15	107,14%	15	15	100,00%	
19	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	12	12	14	116,67%	12	15	125,00%	12	15	125,00%	
20	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100	100	99,15	99,15%	100	86,46	86,46%	100	100	100,00%	
21	kesehatan ibu hamil	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	
22	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumah dukungan logistik kesehatan yyang tersedia	100	100	98,08	98,08%	100	99,52	99,52%	100	100	100,00%	
23		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	
24	Persentase bayi baru lahir mendapatkan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	

No.	Indikator		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun								
				2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
25	pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial ssuai standar	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%
26	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang trsedia	100	100	94,75	94,75%	100	57,06	57,06%	100	100	100,00%
27		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan balita seesuai standar	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%
28	Persentase anak usia pendidikan dasar yang	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100	100	100	100,00%	100	86,9	86,90%	100	100	100,00%
29	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasae sesuai standar	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%
30	Persentase oran usia 15-29 tahun mendapatkan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100	100	100	100,00%	100	95,42	95,42%	100	100	100,00%
31	skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%
32	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100	100	91,21	91,21%	100	98,67	98,67%	100	100	100,00%
33	mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%

No.	Indikator		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun								
				2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
34	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100	100	100	100,00%	100	97,48	97,48%	100	100	100,00%
35		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%
36	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan sesuai standar	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%
37		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%
38	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100	100	100	100,00%	100	82,55	82,55%	100	100	100,00%
39		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100,00%	100	92,33	92,33%	100	100	100,00%
40	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100	100	97,67	97,67%	100	100	100,00%	100	100	100,00%
41		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%
42	Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup		72/100000 KH	70/100000	39.67/100000	143,00%	65/100000	54.82/100000	115,66%	65/100000 KH	86.36/100000	67,14%
43	Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun		9	10	4	160,00%	2	6	-100%	2	9	-250%
44	Presentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan		100,00%	100,00%	96,2%	96,20%	100,00%	98,8%	98,80%	100,00%	100,3%	100,30%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun								
			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
45	Prevelensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	13,22	13	19,6	49,23%	12,5	21,4	28,80%	12,4	24,8	0,00%
46	Prevelensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	7,38	7,34	10,2	61,04%	7,2	10,4	55,56%	7,1	9,4	67,61%
47	insidensi TB per 100.000 penduduk	140,3	272	298,9	90,11%	231	480,4	-7,97%	211	372,6	23,41%
48	insidensi HIV per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV	N/A	0,51%	0,52%	101,96%	0,56%	0,48%	85,71%	0,60%	0,47%	78,33%
49	Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB)	33,30%	50%	86,12%	172,24%	60%	108,95%	181,58%	70%	118,76%	169,66%
50	treatment coverage pada pasien TB	93,20%	90%	69%	76,67%	90%	95,30%	105,89%	90%	63,31%	70,34%
51	presentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	92,9	94,1	51,7	54,94%	94,6	35,6	37,63%	95	84,9	89,37%
52	presentasi puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	96%	96%	96,30%	100,31%	96%	92,59%	96,45%	100%	88,89%	88,89%
53	jumlah puskesmas melaksanakan layanan upaya berhenti merokok (UBM)	1	3	3	100,00%	4	4	100,00%	4	4	100,00%
54	implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	2	3	3	100,00%	4	4	100,00%	4	4	100,00%
55	presentase fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	70	100	75	75,00%	100	80	80,00%	100	82	82,00%
56	presentase sarana produksi UMOT	70	75	72	96,00%	80	73	91,25%	85	74	87,06%
57	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	12643	10.974	10.825	98,64%	10.944	10.838	99,03%	10.904	10.926	100,20%
58	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	12248	10.475	10.072	96,15%	10.446	10.346	99,04%	10.409	10.441	100,31%
59	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	12127	9.976	9.976	100,00%	9.949	10.252	103,05%	9.913	10.315	104,06%
60	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	36419	49.334	48.918	99,16%	49.030	48.157	98,22%	48.775	51.614	105,82%
61	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	14481	56.791	56.791	100,00%	84.814	84.632	99,79%	84.246	101.088	119,99%
62	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	142028	440.139	337.682	76,72%	440.792	391.273	88,77%	313.962	313.965	100,00%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun								
			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
63	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	12988	61.672	37.288	60,46%	37.301	35.812	96,01%	40.450	41.011	101,39%
64	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	35138	175.805	132.970	75,63%	64.082	63.242	98,69%	64.603	64.605	100,00%
65	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	8223	17.263	17.263	100,00%	17.412	19.279	110,72%	17.552	20.253	115,39%
66	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	550	711	611	85,94%	698	668	95,70%	718	773	107,66%
67	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	4027	14354	12361	86,12%	14.580	15885	108,95%	15.184	18.032	118,76%
68	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	11215	17736	15686	88,44%	18.246	18775	102,90%	19.275	22.835	118,47%
69	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	16,25	13,22	19,6	51,74%	12,7	21,4	31,50%	12,3	24,8	-1,63%
70	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	7,53	7,34	10,2	61,04%	7,2	10,4	55,56%	7,1	9,4	67,61%
71	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	78,69	78,51	68	86,61%	79	65,18	82,51%	79,2	79	99,75%
72	Angka Kematian Ibu (AKI).	73.43/100000 KH	72/100000 KH	39.67/100000	142,00%	70/100000 KH	54.82/100000	121,68%	65/100000 KH	86.36/100000	67,14%
73	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	7/1000	7/1000	7.83/1000	88,14%	6/1000	9.31/1000	44,83%	5/1000	8.64/1000	27,2%
74	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	6/1.000 KH	6/1.000 KH	5.95/1000	100,8%	5/1.000 KH	6.11/1000	77,8%%	4/1.000 KH	5.95/1000	51,25%
75	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	7/1000	6/1.000 KH	7.14/1000	81%%	5/1.000 KH	8.34/1000	33,2%	4/1.000 KH	7.87/1000	3,25%
76	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0,43	< 0,29	0,076	< 0,29	< 0,29	0,071	< 0,29	< 0,29	0,079	< 0,29
77	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	140,3	272	298,9	109,89%	231	480,4	207,97%	211	372,6	176,59%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun								
		Tahun 2020	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
78	Kejadian Malaria per 1000 orang.	<1/1000 pddk	<1/1000 pddk	0,15/1000 pdk	100,00%	<1/1000 pddk	0,2/1000 pddk	100,00%	<1/1000 pddk	0,09/1000 pddk	100,00%
79	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	969	986	1021	103,55%	985	988	100,30%	999	976	97,70%
80	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	97,50%	98,00%	99,07%	101,09%	98,50%	100,27%	101,80%	99,00%	99,88%	100,89%
81	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	100	100	85,00	85,00%	100	90,00	90,00%	100	92,00	92,00%
82	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	14	16	29	181,25%	22	29	131,82%	24	30	125,00%

### 2.1.e Kelompok sasaran layanan Dinas Kesehatan

Kelompok sasaran Dinas Kesehatan Kota Balikpapan mencakup individu, kelompok, maupun institusi yang menjadi target dari pelaksanaan program dan kebijakan kesehatan. Sasaran ini dirumuskan berdasarkan kebutuhan layanan, kondisi sosial demografis, prioritas pembangunan kesehatan nasional dan daerah, serta pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Secara umum sasaran layanan kesehatan Dinas Kesehatan adalah seluruh penduduk Kota Balikpapan yang menjadi sasaran program kesehatan dasar seperti pengendalian penyakit menular, kesehatan lingkungan, imunisasi, serta promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Kelompok sasaran layanan kesehatan yang diklasifikasikan berdasarkan kerentanan kesehatan, kebutuhan spesifik, dan prioritas pembangunan nasional dan daerah. Kelompok sasaran ini meliputi :

a. Kelompok Ibu dan Anak

Sasaran pada kelompok Ibu dan Anak adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi baru lahir dan balita. Kelompok Ibu dan Anak ini menjadi alasan prioritas penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, pencegahan dan penurunan prevalensi stunting dan kesehatan reproduksi.

b. Kelompok Usia Produktif (15-59 tahun)

Sasaran pada kelompok usia produktif adalah Remaja dan pekerja formal/nonformal. Alasan prioritas pada kelompok ini adalah Pengendalian penyakit menular dan tidak menular, promosi kesehatan mental dan pencegahan stress, dan Skrining kesehatan berkala untuk deteksi dini risiko PTM

c. Kelompok Lanjut Usia (>60 tahun)

Sasaran pada kelompok lanjut usia ini adalah lansia dengan komorbiditas dan ketergantungan fungsional. Alasan prioritas pada kelompok ini adalah penanganan *multidisease* dan polifarmasi dan peningkatan kualitas hidup lansia yang mandiri.

d. Kelompok Rentan dan Marjinal

Sasaran pada kelompok ini adalah penyandang disabilitas, masyarakat miskin dan penerima BPJS PBI dan kelompok dengan risiko kesehatan lingkungan (masyarakat di daerah padat dan sanitasi buruk). Prioritas pada kelompok ini adalah memastikan akses layanan kesehatan tanpa diskriminasi, memberikan perlindungan kesehatan melalui program jaminan sosial dan melakukan intervensi kesehatan berbasis lingkungan dan perilaku.



- e. Kelompok Prioritas Khusus dan Komunitas Tertentu
- Penderita HIV/AIDS, TBC, dan penyakit infeksi emerging, penyalahguna NAPZA dan populasi terdampak bencana dan darurat kesehatan menjadi sasaran kelompok prioritas khusus dan komunitas tertentu. Prioritas pada kelompok ini adalah pengendalian wabah dan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, rehabilitasi kesehatan jiwa dan napza dan kesiap-siagaan sistem kesehatan pada kondisi darurat.

Dengan memperhatikan berbagai kelompok sasaran tersebut, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan diharapkan mampu merumuskan kebijakan dan program yang lebih terfokus, merata, dan berorientasi bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.Tabel 2.12 Kelompok Sasaran Dinas Kesehatan

**Tabel 2.13 Kelompok Sasaran Dinas Kesehatan**

Program Kesehatan	Kelompok Sasaran
Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi, dan balita
Gizi Masyarakat	Bayi, balita, anak sekolah, ibu hamil, remaja, keluarga berisiko stunting
Imunisasi Dasar Lengkap	Bayi, balita, anak sekolah, kelompok rentan termasuk komunitas adat
Penyakit Tidak Menular (PTM)	Lansia, dewasa, pekerja, komunitas masyarakat umum
Penyakit Menular (HIV, TB, Malaria)	ODHA, penderita TB, warga endemis malaria, kelompok risiko tinggi
Kesehatan Lingkungan	Masyarakat umum, komunitas padat penduduk, daerah terpencil
Promosi Kesehatan dan PHBS	Seluruh lapisan masyarakat, keluarga, komunitas, siswa sekolah
Pelayanan Kesehatan Primer (Puskesmas)	Pasien umum, masyarakat wilayah kerja Puskesmas, SDM kesehatan
Kesehatan Usia Sekolah dan	Siswa SD, SMP, SMA, guru, orang tua, dan

Program Kesehatan	Kelompok Sasaran
Remaja	remaja putri
Kesehatan Lansia dan Disabilitas	Lansia, disabilitas, keluarga lansia, dan caregiver

**2.1.e Mitra Dinas Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tidak dapat bekerja sendiri. Kolaborasi lintas sektor dan kemitraan strategis menjadi kunci utama dalam memperluas jangkauan, meningkatkan kualitas, serta memperkuat ketahanan sistem pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan secara aktif membangun kemitraan dengan berbagai pihak, baik dari sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil.

Salah satu mitra utama Dinas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di bawah koordinasi atau supervisi dinas, seperti Puskesmas, Pustu, Poskesdes, dan Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Kota. Fasilitas ini merupakan ujung tombak dalam pemberian layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif kepada masyarakat. Kemitraan juga dibangun dengan Rumah Sakit Pemerintah lainnya, Rumah Sakit Swasta, klinik swasta, apotek, dan laboratorium kesehatan sebagai penguat layanan kesehatan dasar maupun lanjutan.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkelanjutan, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan secara sinergis berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait melalui mekanisme kolaborasi terintegrasi. BAPPEDA Litbang berperan strategis dalam menyinergikan perencanaan pembangunan kesehatan melalui integrasi program prioritas kesehatan dalam RPJMD dan penyelarasan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Selaras dengan itu, DPM-PTSP memberikan dukungan fundamental melalui percepatan perizinan fasilitas kesehatan dan simplifikasi proses perizinan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Pada aspek pemberdayaan masyarakat, DP3AKB berkoordinasi erat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penguatan program kesehatan reproduksi, sementara PKK mengoptimalkan perannya melalui pergerakan kader kesehatan dalam promosi perilaku hidup

bersih dan sehat di tingkat keluarga. Dinas Pendidikan mendukung secara aktif melalui implementasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang terintegrasi dengan program pencegahan stunting dan skrining kesehatan peserta didik.

Dinas Sosial memberikan kontribusi vital melalui verifikasi data penerima bantuan iuran BPJS PBI dan layanan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memastikan integrasi data kependudukan dengan sistem informasi kesehatan untuk akurasi targeting sasaran program. Dinas Pekerjaan Umum mendukung melalui penyediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi layak di daerah rawan kesehatan, serta revitalisasi akses jalan menuju fasilitas kesehatan.

Dinas Komunikasi dan Informatika mengoptimalkan peran melalui diseminasi informasi kesehatan, sementara Dinas Lingkungan Hidup berkontribusi dalam pengendalian kualitas lingkungan hidup dan penanganan limbah medis. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan bersama DKUMKMP dan Disdag berkoordinasi dalam pengawasan keamanan pangan dan diversifikasi pangan lokal untuk perbaikan gizi masyarakat.

Pada tingkat kecamatan dan kelurahan, dilakukan implementasi program kesehatan berbasis komunitas melalui pendampingan masyarakat dan pergerakan posyandu, sedangkan Forum CSR Kota Balikpapan mendukung melalui penggalangan program corporate social responsibility untuk pengadaan sarana prasarana kesehatan. Kemitraan ini menjadi model sinergi antara sektor pemerintah dan sektor industri dalam memperluas jangkauan pelayanan kesehatan dan meningkatkan ketahanan kesehatan masyarakat Kota Balikpapan. Seluruh kolaborasi ini terintegrasi dalam kerangka kebijakan yang komprehensif guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penguatan Perencanaan Pembangunan Kesehatan di Daerah.

Hubungan kemitraan yang strategis juga dijalin dengan organisasi profesi seperti IDI, PPNI, IBI, dan Persagi, untuk pengembangan SDM kesehatan melalui penguatan kapasitas tenaga kesehatan, penerapan standar pelayanan profesional, dan pengembangan inovasi di bidang kesehatan. Melalui kemitraan yang sinergis ini, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dapat memperkuat fungsi regulasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan, sekaligus memastikan bahwa seluruh tenaga kesehatan di Kota Balikpapan mampu memberikan pelayanan yang bermutu, aman, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.

Di samping itu, Dinas Kesehatan juga menjalin kerja sama dengan tokoh adat, tokoh agama, lembaga keagamaan, LSM, dan media massa sebagai bagian dari strategi promosi kesehatan yang adaptif terhadap kearifan lokal dan struktur sosial budaya masyarakat Kota Balikpapan. Melalui jejaring kemitraan yang luas dan beragam ini, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berdaya jangkauan tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, demi terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan**

### **2.2.2 Permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan**

Upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal terus menghadapi tantangan serius di berbagai level. Meskipun berbagai kebijakan dan program telah diluncurkan, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang menghambat pencapaian target pembangunan kesehatan nasional secara menyeluruh.

Berbagai persoalan tersebut tidak hanya mencakup aspek pelayanan medis semata, tetapi juga menyangkut kesenjangan akses, ketimpangan distribusi sumber daya, serta keterbatasan infrastruktur, khususnya di wilayah-wilayah yang secara geografis sulit dijangkau seperti daerah pesisir dan pegunungan. Kesenjangan ini menjadi hambatan besar dalam upaya menjamin pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi yang dihadapi, berikut ini dipaparkan beberapa permasalahan yang masih menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kota Balikpapan saat ini.

- a. Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta perbaikan gizi masih belum optimal
- b. Belum optimalnya kualitas layanan kesehatan ibu dan bayi
- c. Pengendalian dan pencegahan penyakit menular, tidak menular, dan cakupan imunisasi dasar lengkap masih perlu dioptimalkan
- d. Optimalisasi pembiayaan jaminan kesehatan nasional
- e. Kualitas sarana prasarana, alat kesehatan, dan obat di fasilitas kesehatan masih perlu ditingkatkan
- f. Pemenuhan jumlah, jenis, dan distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan perlu ditingkatkan
- g. Penguatan ketahanan kesehatan melalui pencegahan, deteksi dan respon penanganan, serta perluasan jaringan kesehatan (kader kesehatan, masyarakat, swasta) masih perlu ditingkatkan.

2.2.2 Isu Strategis

Tabel 2.14 Isu Strategis Dinas Kesehatan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Lanjutan tersebar di seluruh kecamatan di Kota Balikpapan	Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi	Angka Kematian Ibu (AKI)	Tingginya angka kematian yang dapat dicegah selama kehamilan dan persalinan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, dan perlunya peningkatan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas	Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi	Belum optimalnya kualitas layanan kesehatan ibu	Jumlah Kematian Ibu
	Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBa) masih tinggi	Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBa)	Masih tingginya angka kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBa) akibat penyakit yang dapat dicegah di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.	Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBa) masih tinggi	Belum optimalnya kualitas layanan kesehatan Bayi dan Balita	Jumlah Kematian Bayi dan Balita

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) masih tinggi	Prevalensi Kasus Stunting dan Wasting pada Balita	Prevalensi Kasus Stunting, Wasting dan Obesitas pada Balita meningkat	Percepatan penurunan stunting dan wasting pada balita	Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta perbaikan gizi masih belum optimal	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) masih tinggi
	Pengendalian dan pencegahan penyakit menular, tidak menular, dan cakupan imunisasi dasar lengkap masih perlu dioptimalkan	Jumlah Kasus Penyakit Menular masih tinggi	1. Penyakit menular (HIV, tuberkulosis, dan malaria) penyebab utama kematian di negara-negara berpenghasilan rendah. 2. Penyakit <i>emerging dan re-emerging</i> . 3. Resistensi antibiotik.		Pengendalian dan pencegahan penyakit menular, tidak menular, dan cakupan imunisasi dasar lengkap dan Imunisasi Baduta Lengkap masih perlu dioptimalkan	Pengendalian dan pencegahan penyakit menular, tidak menular, dan cakupan imunisasi dasar lengkap dan imunisasi baduta lengkap masih perlu dioptimalkan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Angka Kematian Penyakit Tidak Menular tinggi	1. Tingginya proporsi kematian global karena penyakit kardiovaskular, kanker, Penyakit pernafasan kronis dan diabetes. 2. Peningkatan risiko penyakit tidak menular karena penggunaan tembakau, kurangnya aktivitas fisik, penyalahgunaan alkohol, dan pola makan tidak sehat. 3. Kesehatan mental.			
	Pembiayaan Jaminan Kesehatan membutuhkan alokasi anggaran yang sangat besar setiap tahunnya	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		1. Kesenjangan dalam akses pelayanan kesehatan, meningkatnya biaya, dan tantangan dalam mencapai UHC. 2. Kelompok terpinggirkan, tidak memiliki asuransi	Optimalisasi pembiayaan kesehatan	Pembiayaan kepesertaan jaminan kesehatan nasional

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				kesehatan dan dengan kesulitan keuangan rentan gagal dalam pembiayaan kesehatan di negara-negara berpendapatan rendah.		
				Perluasan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional		
	Belum semua bangunan Puskesmas memenuhi standar Kementerian Kesehatan				Kualitas sarana prasarana, alat kesehatan, dan obat di fasilitas kesehatan masih perlu ditingkatkan	
	Terdapat 2 Puskesmas yang bangunannya					



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	masih dalam status sewa					
	Jenis dan Jumlah SDM Kesehatan dan penunjang belum terpenuhi sesuai standar				Pemenuhan jumlah, jenis, dan distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan perlu ditingkatkan	
		Kesiapsiagaan darurat kesehatan	Kurang nya sumber daya yang diperlukan untuk membangun dan memelihara sistem kesehatan yang kuat untuk deteksi dini dan respons terhadap keadaan darurat terutama dinegara berpendapatan rendah hingga mennegah		Penguatan ketahanan kesehatan melalui pencegahan, deteksi dan respon penanganan, serta perluasan jaringan kesehatan (kader kesehatan, masyarakat, swasta) masih perlu ditingkatkan	



**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**3.1 Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029**

Tujuan adalah pernyataan umum mengenai hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka menengah sebagai bagian dari pelaksanaan misi organisasi atau lembaga. Dalam konteks perencanaan strategis perangkat daerah, tujuan menggambarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang bersifat strategis, relevan dengan visi dan misi daerah, serta menjadi dasar bagi perumusan sasaran, program, dan kegiatan. Tujuan bersifat lebih spesifik dibanding visi dan misi. Tujuan Renstra Dinas Kesehatan juga dirancang dengan mempertimbangkan keterkaitan dan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan. Tujuan menjadi rujukan dalam pengalokasian sumber daya dan pengambilan keputusan berbasis data, sehingga pembangunan yang dijalankan bersifat efektif, efisien, dan berkelanjutan. Berikut merupakan tujuan renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Tabel 3.1 Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

**Tabel 3.1 Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029**

VISI RPJMD	MISI RPJMD	Tujuan RPJMD Bidang Kesehatan	Sasaran RPJMD Bidang Kesehatan	Tujuan Renstra Dinkes
Balikpapan Kota Global Nyaman Untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman	Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan Terdidik	SDM Berdaya Saing (Indikator : Indeks Daya Saing)	SDM Balikpapan yang berkualitas (Indikator : Indeks Pembangunan Manusia)	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat (Indikator : Usia Harapan Hidup)

3.2 Sasaran Resntra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

Sasaran adalah penjabaran lebih operasional dari tujuan yang bersifat strategis, yang menggambarkan hasil-hasil konkret dan terukur yang ingin dicapai dalam periode tertentu. Sasaran merupakan tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan, serta penganggaran. Dalam perencanaan strategis perangkat daerah, khususnya sektor kesehatan, sasaran dirumuskan untuk menjawab masalah-masalah spesifik yang dihadapi masyarakat. Sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan relevan, sehingga memungkinkan dilakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian secara berkala. Dengan demikian, sasaran tidak hanya menunjukkan arah pencapaian pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program kesehatan di daerah. Berikut merupakan sasaran renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

Tabel 3.2 Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra Dinkes	Sasaran Renstra Dinkes	Indikator
Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Sasaran 1 : Meningkatkan Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup
		Jumlah Kematian Ibu
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)
	Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sumber Daya Manusia Balikpapan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup	75.87	75.94	76.00	76.23	76.47	76.70	76.94	
		Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	9	5	5	5	4	4	4	
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	24.80	23,06	21,45	19,95	18,55	17,25	16,05	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	84.00	84,98	85.73	86.48	87.23	87.98	88.74	
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	104	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	81.45	81.45	81.76	81.87	81.99	82.12	82.25	

**3.3 Strategi Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029**

Strategi adalah pendekatan menyeluruh yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui penentuan prioritas, alokasi sumber daya, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah dan sistematis. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, strategi mencerminkan langkah-langkah utama yang akan ditempuh oleh perangkat daerah dalam menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, serta mengoptimalkan potensi daerah. Pada sektor kesehatan, strategi menjadi panduan dalam menyusun intervensi yang tepat. Strategi juga mencerminkan tahapan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika wilayah dan kebutuhan masyarakat, agar pelaksanaan program tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga menghasilkan dampak nyata dan berkelanjutan bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Dengan kata lain, strategi adalah jembatan antara perencanaan dan aksi nyata di lapangan. Berikut merupakan strategi renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

**Tabel 3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah**

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
TAHAP KONSOLIDASI & PERCEPATAN AWAL	TAHAP AKSELERASI & EKSPANSI	TAHAP PENINGKATAN KUALITAS & INTENSIFIKASI	TAHAP PENGUATAN SISTEM & SINERGI	TAHAP PENCAPAIAN TARGET & KEBERLANJUTAN
Audit maternal perinatal menyeluruh untuk setiap kematian	Penguatan Layanan ANC Berkualitas & Skrining Komorbid	Peningkatan Sistem Rujukan Kegawatdaruratan	Pemantapan & Intensifikasi Pemantauan Masa Nifas	Edukasi masif untuk mengenali tanda bahaya kehamilan dan persalinan serta pengembangan inovasi layanan Kesehatan Ibu
Intervensi Gizi Spesifik Intensif pada Sasaran Prioritas	Akselerasi Intervensi Sensitif Lintas Sektor	Penguatan Sistem Monitoring & Evaluasi Berbasis Data	Intensifikasi pada Keluarga Berisiko Tinggi dan Pendampingan	Pengembangan inovasi layanan gizi berbasis komunitas dan teknologi
Konsolidasi dan penguatan	Peningkatan Deteksi Dini	Integrasi layanan TBC dengan	Mengembangkan sistem dukungan	Pemantapan dan Keberlanjutan

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
kapasitas layanan kesehatan pemerintah dan swasta	dan Penanganan Cepat	program penyakit komorbid (HIV, Diabetes).	nutrisi dan sosial ekonomi untuk pasien TB dari keluarga miskin	termasuk Audit terhadap semua kasus putus berobat (loss to follow-up) untuk mendapatkan umpan balik perbaikan
Validasi Data & Kepastian Kepesertaan	Optimalisasi Layanan di Faskes Primer	Peningkatan Kualitas Layanan dan Pengaduan	Meningkatkan cakupan skrining kesehatan sebagai bentuk transformasi layanan kuratif ke preventif	Terwujudnya sistem pembiayaan kesehatan yang sinergis antara APBD dan JKN
Penguatan pada elemen pelaporan kinerja evaluasi AKIP	Peningkatan kualitas laporan kinerja	Integrasi data kinerja dan peningkatan kapabilitas SDM	Pemantapan sistem mutu dan melakukan Benchmarking	Mempertahankan dan meningkatkan semua capaian serta menjadikan ini sebagai budaya kerja



**3.4 Arah Kebijakan Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029**

Arah kebijakan adalah penjabaran garis besar keputusan strategis yang menjadi pedoman dalam merumuskan dan melaksanakan program serta kegiatan pembangunan. Arah kebijakan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjawab isu-isu strategis dan permasalahan prioritas, serta mengarahkan seluruh perangkat daerah agar bergerak secara terkoordinasi dan konsisten menuju tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam bidang kesehatan, arah kebijakan disusun berdasarkan kerangka regulasi nasional, seperti undang- undang dan peraturan menteri, serta disesuaikan dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan juga menunjukkan fokus intervensi yang akan dilakukan. Dengan demikian, arah kebijakan menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap langkah pembangunan selaras dengan visi dan misi daerah serta berdampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berikut merupakan arah kebijakan Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan.

**Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah**

<b>Operasionalisasi NSPK</b>	<b>Arah Kebijakan RPJMD</b>	<b>Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
UU Kesehatan No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta perbaikan gizi	Peningkatan Kualitas Intervensi Gizi Terintegrasi untuk Percepatan Penurunan Stunting	
Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun		Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Peningkatan Derajat Kesehatan Ibu dan Anak	

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
2023 Tentang Kesehatan			
	Pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan peningkatan cakupan imunisasi	Penguatan Sistem Surveilans dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular.	
	Penguatan sistem pelayanan kesehatan meliputi sarana prasarana dan alat, obat, tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan	Penguatan Akses, Mutu, dan Ketersediaan Sumber Daya Kesehatan di Fasilitas Pelayanan	
	Penguatan ketahanan kesehatan melalui pencegahan, deteksi dan respon penanganan, serta perluasan	Pembangunan Ketahanan Kesehatan melalui Penguatan Jejaring dan Kesiapsiagaan	

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
	jaringan kesehatan (kader kesehatan, masyarakat, swasta)		
	Integrasi layanan primer	Optimalisasi Layanan Kesehatan Primer yang Terintegrasi dan Berkesinambungan	
	Pembangunan Prasarana Layanan Kesehatan Berupa Rumah Sakit Tipe A dan Tipe B	Akselerasi Pembangunan Prasarana Kesehatan Strategis	
		Optimalisasi Pembiayaan Kesehatan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Uraian Program**

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan Kota Balikpapan yaitu "Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat", Dinas Kesehatan Kota Balikpapan menyusun sejumlah program yang dirancang untuk menjawab tantangan kesehatan saat ini dan mendatang. Setiap program dilengkapi dengan rasionalitas, sasaran, indikator kinerja, serta keterkaitan dengan target RPJMD dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Uraian program dalam bab ini menjadi acuan operasional bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pembangunan kesehatan selama lima tahun ke depan. Secara nomenklatur program Dinas Kesehatan diantaranya :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
- e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					647.668.117.000		825.713.750.000		833.970.888.000		842.310.597.000		850.733.703.000	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					386.927.139.400		381.703.197.000		395.180.009.723		437.002.676.440		478.929.027.254	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	77,42	78,92	386.927.139.400	80,42	381.703.197.000	81,92	395.180.009.723	83,42	437.002.676.440	83,42	478.929.027.254	Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		Dinas Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	77,42	78,92		80,42		81,92		83,42		83,42		Dinas Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					255.135.977.600		438.087.500.000		432.282.769.277		398.513.850.560		364.608.448.746	
Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100	255.135.977.600	100	438.087.500.000	100	432.282.769.277	100	398.513.850.560	100	364.608.448.746	Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		Dinas Kesehatan
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		Dinas Kesehatan
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		Dinas Kesehatan
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		Dinas Kesehatan
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		Dinas Kesehatan
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		Dinas Kesehatan
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		Dinas Kesehatan
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		Dinas Kesehatan
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		Dinas Kesehatan
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		Dinas Kesehatan
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		Dinas Kesehatan
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		Dinas Kesehatan
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		Dinas Kesehatan
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		Dinas Kesehatan
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		Dinas Kesehatan
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		Dinas Kesehatan
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		Dinas Kesehatan
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		Dinas Kesehatan
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		Dinas Kesehatan
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		Dinas Kesehatan
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		Dinas Kesehatan
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		Dinas Kesehatan
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		Dinas Kesehatan
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		Dinas Kesehatan
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		Dinas Kesehatan
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		Dinas Kesehatan
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		Dinas Kesehatan
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		Dinas Kesehatan
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		Dinas Kesehatan
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		Dinas Kesehatan
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		Dinas Kesehatan
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		Dinas Kesehatan
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	15	30		45		60		70		80		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	81,6	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2		Dinas Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.570.000.000		1.427.500.000		1.533.500.000		1.537.500.000		1.544.000.000	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	100	100	100	1.570.000.000	100	1.427.500.000	100	1.533.500.000	100	1.537.500.000	100	1.544.000.000	Dinas Kesehatan
	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. (%)	85,19	85,19	86,2		87,32		88,3		89,2		90,02		Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					1.135.000.000		1.405.000.000		1.605.000.000		1.650.000.000		1.850.000.000	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (Persentase)	100	100	100	1.135.000.000	100	1.405.000.000	100	1.605.000.000	100	1.650.000.000	100	1.850.000.000	Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Dokumen Hasil pengawasan Perusahaan Rumah Tangga Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					2.900.000.000		3.090.553.000		3.369.609.000		3.606.570.000		3.802.227.000	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (Persentase)	100	100	100	2.900.000.000	100	3.090.553.000	100	3.369.609.000	100	3.606.570.000	100	3.802.227.000	Dinas Kesehatan
TOTAL KESELURUHAN					647.668.117.000		825.713.750.000		833.970.888.000		842.310.597.000		850.733.703.000	

## **4.2 Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Sebagai penjabaran operasional terhadap rencana program prioritas dan indikator kinerja program yang disesuaikan dengan skala prioritas di Daerah, maka disepakati kegiatan dan sub kegiatan indikatif yang akan direncanakan akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2030 yang akan datang, sebagai bagian dari upaya untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan pada periode tahun 2025-2030, dimana dapat disampaikan disini bahwa dalam pemilihan jenis kegiatan ini bersifat indikatif disesuaikan dengan prediksi kemampuan daerah serta isu-isu strategis yang ada pada saat proses penyusunan dokumen RENSTRA Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, namun dalam perkembangannya kegiatan yang bersifat indikatif dimaksud dimungkinkan untuk dilakukannya penyesuaian/ revisi sesuai perkembangan situasi dan kondisi yang kemungkinan terjadi pada saat periode tahun 2025-2030 dimaksud.

Untuk lebih jelasnya rincian kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang rencananya akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dimaksud dapat dilihat pada Tabel 4.2 yang memuat secara rinci tentang Tujuan, Sasaran, Outcome, Output, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, serta Data Capaian pada awal Tahun perencanaan RENSTRA (Tahun 2024), Target Kinerja dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada periode Tahun 2025-2030 dan Kerangka Pendanaan Indikatif untuk mendukung target kinerja tahun 2025-2030, serta kondisi kinerja yang diharapkan akan dicapai pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (pada Tahun 2030).

**Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN</b>							
- SDM Balikpapan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
		Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat			Jumlah Kematian Ibu (Jiwa)		
					Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)		
					Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))		
					Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))		
			Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat		Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Fasilitas kesehatan milik pemerintah kota sesuai standar Kementerian Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					dan Pemeliharaan (Unit)		
					Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	1.02.02.2.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	
					Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1.02.02.2.01.0003 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
					Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	1.02.02.2.01.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	1.02.02.2.01.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional	1.02.02.2.01.0015 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Maintainance Center (Unit)		
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
					Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Sesuai Standar (Orang)	Kesehatan Bayi Baru Lahir	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan	1.02.02.2.02.0019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Tradisional Lainnya (Dokumen)	Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0024 - Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
					Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
					Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	1.02.02.2.02.0043 - Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi	
					Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	1.02.02.2.02.0050 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
				Terlaksananya penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1.02.02.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	1.02.02.2.04.0004 - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
					Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
					Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. (%)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
					Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.01.0001 - Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.01.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
				Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (Persentase)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
					Persentase Dokumen Hasil pengawasan Perusahaan Rumah Tangga Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang ditindaklanjuti (Persentase)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Terlaksananya pemberian rekomendasi Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT yang sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha	1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
				Terlaksananya pemberian Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang sesuai standar	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen)	1.02.04.2.02 - Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen)	1.02.04.2.02.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	
				Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
				Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
				Terlaksananya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	1.02.04.2.05 - Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	1.02.04.2.05.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
					Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (Persentase)	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
				Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
					Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
				Terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
				Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Daerah Kabupaten/Kota			
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			kinerja perangkat daerah				
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Perangkat Daerah			
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	1.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Lainnya yang Disediakan (Unit)	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Pemerintahan Daerah			
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PUSKESMAS MANGGAR</b>							
- SDM Balikpapan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat		Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	

**1.02.0.00.0.00.01.0002 - UPTD PUSKESMAS TERITIP**



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
- SDM Balikpapan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat		Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
1.02.0.00.0.00.01.0003 - UPTD PUSKESMAS LAMARU							
- SDM Balikpapan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat		Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	

[illegible]

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
- SDM Balikpapan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat		Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	

[illegible]

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
- SDM Balikpapan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat		Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
1.02.0.00.0.00.01.0006 - UPTD PUSKESMAS GUNUNG BAHAGIA							
- SDM Balikpapan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat		Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
1.02.0.00.0.00.01.0007 - UPTD PUSKESMAS DAMAI							
- SDM Balikpapan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat		Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
1.02.0.00.0.00.01.0008 - UPTD PUSKESMAS KLANDASAN ILIR							

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
- SDM Balikpapan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat		Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
1.02.0.00.0.00.01.0009 - UPTD PUSKESMAS PRAPATAN							
- SDM Balikpapan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat		Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
1.02.0.00.0.00.01.0010 - UPTD PUSKESMAS TELAGASARI							
- SDM Balikpapan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat		Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
1.02.0.00.0.00.01.0011 - UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ILIR							
- SDM Balikpapan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat		Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
1.02.0.00.0.00.01.0012 - UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ULU							
- SDM Balikpapan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat		Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
1.02.0.00.0.00.01.0013 - UPTD PUSKESMAS MEKARSARI							
- SDM Balikpapan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat		Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
1.02.0.00.0.00.01.0014 - UPTD PUSKESMAS KARANG JATI							
- SDM Balikpapan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat		Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
1.02.0.00.0.00.01.0015 - UPTD PUSKESMAS KARANG REJO							
- SDM Balikpapan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat		Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
1.02.0.00.0.00.01.0016 - UPTD PUSKESMAS SUMBER REJO							
- SDM Balikpapan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat		Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
1.02.0.00.0.00.01.0017 - UPTD PUSKESMAS MUARA RAPAK							
- SDM Balikpapan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat		Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
1.02.0.00.0.00.01.0018 - UPTD PUSKESMAS GUNUNG SAMARINDA							
- SDM Balikpapan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat		Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
1.02.0.00.0.00.01.0019 - UPTD PUSKESMAS BATU AMPAR							
- SDM Balikpapan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat		Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
1.02.0.00.0.00.01.0020 - UPTD PUSKESMAS GRAHA INDAH							
- SDM Balikpapan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat		Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
1.02.0.00.0.00.01.0021 - UPTD PUSKESMAS KARANG JOANG							
- SDM Balikpapan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat		Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
1.02.0.00.0.00.01.0022 - UPTD PUSKESMAS KARIANGAU							
- SDM Balikpapan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat		Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
1.02.0.00.0.00.01.0023 - UPTD PUSKESMAS MARGO MULYO							
- SDM Balikpapan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat		Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
1.02.0.00.0.00.01.0024 - UPTD PUSKESMAS BARU ILIR							
- SDM Balikpapan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat		Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
1.02.0.00.0.00.01.0025 - UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH							
- SDM Balikpapan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat		Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
1.02.0.00.0.00.01.0026 - UPTD PUSKESMAS BARU ULU							
- SDM Balikpapan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat		Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
1.02.0.00.0.00.01.0027 - UPTD PUSKESMAS MARGASARI							
- SDM Balikpapan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat		Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
1.02.0.00.0.00.01.0028 - UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH							
- SDM Balikpapan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat		Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
1.02.0.00.0.00.01.0029 - UPTD INSTALASI FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN							
- SDM Balikpapan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat		Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
1.02.0.00.0.00.01.0030 - UPTD Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)							
- SDM Balikpapan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat		Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0031 - UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</b>							
- SDM Balikpapan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat		Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
1.02.0.00.0.00.01.0032 - UPTD-RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU							
- SDM Balikpapan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat		Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	

#### **4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif**

Untuk lebih jelasnya rincian kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang rencananya akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dimaksud dapat dilihat pada Tabel 4.3 dibawah ini, yang memuat secara rinci tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, serta Data Capaian pada awal Tahun perencanaan RENSTRA (Tahun 2024), Target Kinerja dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada periode Tahun 2025-2030 dan Kerangka Pendanaan Indikatif untuk mendukung target kinerja tahun 2025-2030, serta kondisi kinerja yang diharapkan akan dicapai pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (pada Tahun 2030).

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				647.668.117.000		825.713.750.000		833.970.888.000		842.310.597.000		850.733.703.000		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				386.927.139.400		381.703.197.000		395.180.009.723		437.002.676.440		478.929.027.254		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	78,92	386.927.139.400	80,42	381.703.197.000	81,92	395.180.009.723	83,42	437.002.676.440	83,42	478.929.027.254	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000		
1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		350.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000		
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				236.329.900.000		244.406.849.133		253.849.689.598		277.698.032.190		306.338.092.000		
Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.197	1.441	236.329.900.000	1.585	244.406.849.133	1.870	253.849.689.598	1.918	277.698.032.190	2.110	306.338.092.000		
1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				236.329.900.000		244.406.849.133		253.849.689.598		277.698.032.190		306.338.092.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.197	1.441	236.329.900.000	1.585	244.406.849.133	1.870	253.849.689.598	1.918	277.698.032.190	2.110	306.338.092.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		1.268.000.000		0		0		0		
Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	-	0	1.585	1.268.000.000	-	0	-	0	-	0		
1.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		1.268.000.000		0		0		0		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	-	0	1.585	1.268.000.000	-	0	-	0	-	0		
1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.460.000.000		2.622.520.000		3.026.598.000		3.329.257.600		3.284.062.000		
Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	336	1	2.460.000.000	1	2.622.520.000	1	3.026.598.000	1	3.329.257.600	1	3.284.062.000		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	20	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	31	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah	3	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tangga yang Disediakan (Paket)													
1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000		
Tersedianya Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	5	2	50.000.000	2	55.000.000	2	60.500.000	2	66.550.000	2	73.205.000		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)													
1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000		136.520.000		150.172.000		165.189.000		181.708.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	31	4	200.000.000	4	136.520.000	4	150.172.000	4	165.189.000	4	181.708.000		
1.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		22.000.000		24.200.000		26.620.000		29.282.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	2	20.000.000	2	22.000.000	2	24.200.000	2	26.620.000	2	29.282.000		
1.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				550.000.000		605.000.000		665.500.000		732.050.000		729.255.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	2	550.000.000	2	605.000.000	2	665.500.000	2	732.050.000	2	729.255.000		
1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				200.000.000		220.000.000		383.826.000		422.208.600		464.430.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	5	200.000.000	5	220.000.000	5	383.826.000	5	422.208.600	5	464.430.000		
1.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				30.000.000		33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3	30.000.000	3	33.000.000	3	36.300.000	3	39.930.000	3	43.923.000		
1.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	20	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	1	73.205.000		
1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.200.000.000		1.320.000.000		1.452.000.000		1.597.200.000		1.650.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	336	1	1.200.000.000	1	1.320.000.000	1	1.452.000.000	1	1.597.200.000	1	1.650.000.000		
1.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				160.000.000		176.000.000		193.600.000		212.960.000		39.054.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	160.000.000	1	176.000.000	1	193.600.000	1	212.960.000	1	39.054.000		
1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4.150.110.600		6.782.815.367		5.986.870.000		6.436.900.000		7.916.030.000		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	6	4.150.110.600	7	6.782.815.367	1.472	5.986.870.000	8	6.436.900.000	20	7.916.030.000		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	31	26		28		30		33		36			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	80	95		104		115		126		138			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	11	2		3		27		27		27			
1.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				747.000.000		821.700.000		903.870.000		945.600.000		975.600.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6	6	747.000.000	6	821.700.000	6	903.870.000	6	945.600.000	6	975.600.000		
1.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				903.110.600		3.211.115.367		2.268.000.000		2.494.800.000		2.744.280.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	11	2	903.110.600	3	3.211.115.367	27	2.268.000.000	27	2.494.800.000	27	2.744.280.000		
1.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				1.000.000.000		1.100.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		2.000.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	6	1.000.000.000	7	1.100.000.000	1.472	1.000.000.000	8	1.000.000.000	20	2.000.000.000		
1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				500.000.000		550.000.000		605.000.000		665.500.000		732.050.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	80	95	500.000.000	104	550.000.000	115	605.000.000	126	665.500.000	138	732.050.000		
1.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.000.000.000		1.100.000.000		1.210.000.000		1.331.000.000		1.464.100.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	31	26	1.000.000.000	28	1.100.000.000	30	1.210.000.000	33	1.331.000.000	36	1.464.100.000		
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.525.000.000		1.677.500.000		1.845.250.000		2.029.775.000		2.240.314.500		
Terlaksananya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	3	1.525.000.000	3	1.677.500.000	4	1.845.250.000	4	2.029.775.000	5	2.240.314.500		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	3		3		4		4		5			
1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				600.000.000		660.000.000		726.000.000		798.600.000		886.022.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	3	600.000.000	3	660.000.000	4	726.000.000	4	798.600.000	5	886.022.000		
1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				925.000.000		1.017.500.000		1.119.250.000		1.231.175.000		1.354.292.500		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	3	925.000.000	3	1.017.500.000	4	1.119.250.000	4	1.231.175.000	5	1.354.292.500		
1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.850.000.000		5.335.000.000		5.465.564.000		6.012.121.000		6.613.333.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	3	4.850.000.000	1	5.335.000.000	1	5.465.564.000	1	6.012.121.000	1	6.613.333.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	284	341		375		410		251		276			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	11		11		12		12		13			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	7		7		8		8		9			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	211	209		215		220		225		230			
1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				150.000.000		165.000.000		181.500.000		199.650.000		219.615.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	7	150.000.000	7	165.000.000	8	181.500.000	8	199.650.000	9	219.615.000		
1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.500.000.000		2.750.000.000		3.025.000.000		3.327.500.000		3.660.250.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	211	209	2.500.000.000	215	2.750.000.000	220	3.025.000.000	225	3.327.500.000	230	3.660.250.000		
1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000.000		220.000.000		242.000.000		266.200.000		292.820.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	11	200.000.000	11	220.000.000	12	242.000.000	12	266.200.000	13	292.820.000		
1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				750.000.000		825.000.000		907.500.000		998.250.000		1.098.075.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	3	750.000.000	1	825.000.000	1	907.500.000	1	998.250.000	1	1.098.075.000		
1.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.250.000.000		1.375.000.000		1.109.564.000		1.220.521.000		1.342.573.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	284	341	1.250.000.000	375	1.375.000.000	410	1.109.564.000	251	1.220.521.000	276	1.342.573.000		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				0		550.000.000		605.000.000		12.665.500.000		17.732.050.000		
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	-	-	0	1	550.000.000	1	605.000.000	2	12.665.500.000	2	17.732.050.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				0		550.000.000		605.000.000		12.665.500.000		17.732.050.000		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	-	-	0	1	550.000.000	1	605.000.000	2	12.665.500.000	2	17.732.050.000		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	78,92	386.927.139.400	80,42	381.703.197.000	81,92	395.180.009.723	83,42	437.002.676.440	83,42	478.929.027.254	1.02.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PUSKESMAS MANGGAR	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.200.000.000		1.260.000.000		1.323.000.000		1.389.150.000		1.458.607.500		
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1.200.000.000	1	1.260.000.000	1	1.323.000.000	1	1.389.150.000	1	1.458.607.500		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.200.000.000		1.260.000.000		1.323.000.000		1.389.150.000		1.458.607.500		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1.200.000.000	1	1.260.000.000	1	1.323.000.000	1	1.389.150.000	1	1.458.607.500		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	78,92	386.927.139.400	80,42	381.703.197.000	81,92	395.180.009.723	83,42	437.002.676.440	83,42	478.929.027.254	1.02.0.00.0.00.01.0002 - UPTD PUSKESMAS TERITIP	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				870.000.000		913.500.000		959.175.000		1.007.133.750		1.057.490.400		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	870.000.000	1	913.500.000	1	959.175.000	1	1.007.133.750	1	1.057.490.400		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				870.000.000		913.500.000		959.175.000		1.007.133.750		1.057.490.400		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	870.000.000	1	913.500.000	1	959.175.000	1	1.007.133.750	1	1.057.490.400		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	78,92	386.927.139.400	80,42	381.703.197.000	81,92	395.180.009.723	83,42	437.002.676.440	83,42	478.929.027.254	1.02.0.00.0.00.01.0003 - UPTD PUSKESMAS LAMARU	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				850.000.000		892.500.000		937.125.000		983.981.250		1.033.181.000		
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	850.000.000	1	892.500.000	1	937.125.000	1	983.981.250	1	1.033.181.000		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				850.000.000		892.500.000		937.125.000		983.981.250		1.033.181.000		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	850.000.000	1	892.500.000	1	937.125.000	1	983.981.250	1	1.033.181.000		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	78,92	386.927.139.400	80,42	381.703.197.000	81,92	395.180.009.723	83,42	437.002.676.440	83,42	478.929.027.254	1.02.0.00.0.00.01.0004 - UPTD PUSKESMAS MANGGAR BARU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.750.000.000		1.837.500.000		1.929.375.000		2.025.843.750		2.127.135.900		
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1.750.000.000	1	1.837.500.000	1	1.929.375.000	1	2.025.843.750	1	2.127.135.900		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.750.000.000		1.837.500.000		1.929.375.000		2.025.843.750		2.127.135.900		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1.750.000.000	1	1.837.500.000	1	1.929.375.000	1	2.025.843.750	1	2.127.135.900		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	78,92	386.927.139.400	80,42	381.703.197.000	81,92	395.180.009.723	83,42	437.002.676.440	83,42	478.929.027.254	1.02.0.00.0.00.01.0005 - UPTD PUSKESMAS SEPINGGAN	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				3.000.000.000		3.150.000.000		3.307.500.000		3.472.875.000		3.646.518.750		
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	3.000.000.000	1	3.150.000.000	1	3.307.500.000	1	3.472.875.000	1	3.646.518.750		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				3.000.000.000		3.150.000.000		3.307.500.000		3.472.875.000		3.646.518.750		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	3.000.000.000	1	3.150.000.000	1	3.307.500.000	1	3.472.875.000	1	3.646.518.750	1.02.0.00.0.00.01.0006 - UPTD PUSKESMAS GUNUNG BAHAGIA	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	78,92	386.927.139.400	80,42	381.703.197.000	81,92	395.180.009.723	83,42	437.002.676.440	83,42	478.929.027.254		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
kinerja perangkat daerah														
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.400.000.000		1.470.000.000		1.543.500.000		1.620.675.000		1.701.708.750		
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1.400.000.000	1	1.470.000.000	1	1.543.500.000	1	1.620.675.000	1	1.701.708.750		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.400.000.000		1.470.000.000		1.543.500.000		1.620.675.000		1.701.708.750		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1.400.000.000	1	1.470.000.000	1	1.543.500.000	1	1.620.675.000	1	1.701.708.750		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	78,92	386.927.139.400	80,42	381.703.197.000	81,92	395.180.009.723	83,42	437.002.676.440	83,42	478.929.027.254	1.02.0.00.0.00.01.0007 - UPTD PUSKESMAS DAMAI	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.700.000.000		1.785.000.000		1.874.250.000		1.967.962.500		2.066.360.625		
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1.700.000.000	1	1.785.000.000	1	1.874.250.000	1	1.967.962.500	1	2.066.360.625		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.700.000.000		1.785.000.000		1.874.250.000		1.967.962.500		2.066.360.625		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1.700.000.000	1	1.785.000.000	1	1.874.250.000	1	1.967.962.500	1	2.066.360.625		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	78,92	386.927.139.400	80,42	381.703.197.000	81,92	395.180.009.723	83,42	437.002.676.440	83,42	478.929.027.254	1.02.0.00.0.00.01.0008 - UPTD PUSKESMAS KLANDASAN ILIR	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				2.000.000.000		2.100.000.000		2.205.000.000		2.315.250.000		2.431.012.500		
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	2.000.000.000	1	2.100.000.000	1	2.205.000.000	1	2.315.250.000	1	2.431.012.500		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2.000.000.000		2.100.000.000		2.205.000.000		2.315.250.000		2.431.012.500		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	2.000.000.000	1	2.100.000.000	1	2.205.000.000	1	2.315.250.000	1	2.431.012.500		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	78,92	386.927.139.400	80,42	381.703.197.000	81,92	395.180.009.723	83,42	437.002.676.440	83,42	478.929.027.254	1.02.0.00.0.00.01.0009 - UPTD PUSKESMAS PRAPATAN	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				950.000.000		997.500.000		1.047.375.000		1.099.743.750		1.154.730.900		
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	950.000.000	1	997.500.000	1	1.047.375.000	1	1.099.743.750	1	1.154.730.900		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				950.000.000		997.500.000		1.047.375.000		1.099.743.750		1.154.730.900		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	950.000.000	1	997.500.000	1	1.047.375.000	1	1.099.743.750	1	1.154.730.900	1.02.0.00.0.00.01.0010 - UPTD PUSKESMAS TELAGASARI	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	78,92	386.927.139.400	80,42	381.703.197.000	81,92	395.180.009.723	83,42	437.002.676.440	83,42	478.929.027.254		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				600.000.000		630.000.000		661.500.000		694.575.000		729.303.750		
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	600.000.000	1	630.000.000	1	661.500.000	1	694.575.000	1	729.303.750		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				600.000.000		630.000.000		661.500.000		694.575.000		729.303.750		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	600.000.000	1	630.000.000	1	661.500.000	1	694.575.000	1	729.303.750	1.02.0.00.0.00.01.0011 - UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ILIR	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	78,92	386.927.139.400	80,42	381.703.197.000	81,92	395.180.009.723	83,42	437.002.676.440	83,42	478.929.027.254		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				800.000.000		840.000.000		882.000.000		926.100.000		972.405.000		
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	800.000.000	1	840.000.000	1	882.000.000	1	926.100.000	1	972.405.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				800.000.000		840.000.000		882.000.000		926.100.000		972.405.000		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	800.000.000	1	840.000.000	1	882.000.000	1	926.100.000	1	972.405.000		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	78,92	386.927.139.400	80,42	381.703.197.000	81,92	395.180.009.723	83,42	437.002.676.440	83,42	478.929.027.254	1.02.0.00.0.00.01.0012 - UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ULU	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				500.000.000		525.000.000		551.250.000		578.812.500		607.753.125		
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	500.000.000	1	525.000.000	1	551.250.000	1	578.812.500	1	607.753.125		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				500.000.000		525.000.000		551.250.000		578.812.500		607.753.125		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja )	1	1	500.000.000	1	525.000.000	1	551.250.000	1	578.812.500	1	607.753.125		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	78,92	386.927.139.400	80,42	381.703.197.000	81,92	395.180.009.723	83,42	437.002.676.440	83,42	478.929.027.254	1.02.0.00.0.00.01.0013 - UPTD PUSKESMAS MEKARSARI	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.600.000.000		1.680.000.000		1.764.000.000		1.852.200.000		1.944.810.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1.600.000.000	1	1.680.000.000	1	1.764.000.000	1	1.852.200.000	1	1.944.810.000		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.600.000.000		1.680.000.000		1.764.000.000		1.852.200.000		1.944.810.000		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1.600.000.000	1	1.680.000.000	1	1.764.000.000	1	1.852.200.000	1	1.944.810.000		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	78,92	386.927.139.400	80,42	381.703.197.000	81,92	395.180.009.723	83,42	437.002.676.440	83,42	478.929.027.254	1.02.0.00.0.00.01.0014 - UPTD PUSKESMAS KARANG JATI	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				504.000.000		529.200.000		555.660.000		583.443.000		612.615.150		
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	504.000.000	1	529.200.000	1	555.660.000	1	583.443.000	1	612.615.150		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				504.000.000		529.200.000		555.660.000		583.443.000		612.615.150		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	504.000.000	1	529.200.000	1	555.660.000	1	583.443.000	1	612.615.150		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	78,92	386.927.139.400	80,42	381.703.197.000	81,92	395.180.009.723	83,42	437.002.676.440	83,42	478.929.027.254	1.02.0.00.0.00.01.0015 - UPTD PUSKESMAS KARANG REJO	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.050.000.000		1.102.500.000		1.157.625.000		1.215.506.250		1.276.281.562		
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1.050.000.000	1	1.102.500.000	1	1.157.625.000	1	1.215.506.250	1	1.276.281.562		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.050.000.000		1.102.500.000		1.157.625.000		1.215.506.250		1.276.281.562		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1.050.000.000	1	1.102.500.000	1	1.157.625.000	1	1.215.506.250	1	1.276.281.562		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	78,92	386.927.139.400	80,42	381.703.197.000	81,92	395.180.009.723	83,42	437.002.676.440	83,42	478.929.027.254	1.02.0.00.0.00.01.0016 - UPTD PUSKESMAS SUMBER REJO	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				810.000.000		850.500.000		893.025.000		937.676.250		984.560.062		
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	810.000.000	1	850.500.000	1	893.025.000	1	937.676.250	1	984.560.062		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				810.000.000		850.500.000		893.025.000		937.676.250		984.560.062		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	810.000.000	1	850.500.000	1	893.025.000	1	937.676.250	1	984.560.062	1.02.0.00.0.00.01.0017 - UPTD PUSKESMAS MUARA RAPAK	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	78,92	386.927.139.400	80,42	381.703.197.000	81,92	395.180.009.723	83,42	437.002.676.440	83,42	478.929.027.254		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
kinerja perangkat daerah														
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				892.500.000		937.125.000		983.981.250		1.033.181.000		1.084.840.050		
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	892.500.000	1	937.125.000	1	983.981.250	1	1.033.181.000	1	1.084.840.050		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				892.500.000		937.125.000		983.981.250		1.033.181.000		1.084.840.050		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	892.500.000	1	937.125.000	1	983.981.250	1	1.033.181.000	1	1.084.840.050		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	78,92	386.927.139.400	80,42	381.703.197.000	81,92	395.180.009.723	83,42	437.002.676.440	83,42	478.929.027.254	1.02.0.00.0.00.01.0018 - UPTD PUSKESMAS GUNUNG SAMARINDA	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.235.000.000		1.296.750.000		1.361.587.500		1.429.666.875		1.501.150.218		
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1.235.000.000	1	1.296.750.000	1	1.361.587.500	1	1.429.666.875	1	1.501.150.218		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.235.000.000		1.296.750.000		1.361.587.500		1.429.666.875		1.501.150.218		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1.235.000.000	1	1.296.750.000	1	1.361.587.500	1	1.429.666.875	1	1.501.150.218		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	78,92	386.927.139.400	80,42	381.703.197.000	81,92	395.180.009.723	83,42	437.002.676.440	83,42	478.929.027.254	1.02.0.00.0.00.01.0019 - UPTD PUSKESMAS BATU AMPAR	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.026.000.000		1.077.300.000		1.131.165.000		1.187.723.250		1.247.109.412		
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1.026.000.000		1.077.300.000		1.131.165.000		1.187.723.250		1.247.109.412		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.026.000.000		1.077.300.000		1.131.165.000		1.187.723.250		1.247.109.412		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1.026.000.000		1.077.300.000		1.131.165.000		1.187.723.250		1.247.109.412		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	78,92	386.927.139.400	80,42	381.703.197.000	81,92	395.180.009.723	83,42	437.002.676.440	83,42	478.929.027.254	1.02.0.00.0.00.01.0020 - UPTD PUSKESMAS GRAHA INDAH	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				800.000.000		840.000.000		882.000.000		926.100.000		972.405.000		
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	800.000.000	1	840.000.000	1	882.000.000	1	926.100.000	1	972.405.000		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				800.000.000		840.000.000		882.000.000		926.100.000		972.405.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	800.000.000	1	840.000.000	1	882.000.000	1	926.100.000	1	972.405.000		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	78,92	386.927.139.400	80,42	381.703.197.000	81,92	395.180.009.723	83,42	437.002.676.440	83,42	478.929.027.254	1.02.0.00.0.00.01.0021 - UPTD PUSKESMAS KARANG JOANG	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				2.450.000.000		2.572.500.000		2.701.125.000		2.836.181.250		2.977.990.312		
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		2.450.000.000		2.572.500.000		2.701.125.000		2.836.181.250		2.977.990.312		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2.450.000.000		2.572.500.000		2.701.125.000		2.836.181.250		2.977.990.312		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		2.450.000.000		2.572.500.000		2.701.125.000		2.836.181.250		2.977.990.312		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	78,92	386.927.139.400	80,42	381.703.197.000	81,92	395.180.009.723	83,42	437.002.676.440	83,42	478.929.027.254	1.02.0.00.0.00.01.0022 - UPTD PUSKESMAS KARIANGAU	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				718.750.000		754.687.500		792.421.875		832.042.900		873.645.045		
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	718.750.000	1	754.687.500	1	792.421.875	1	832.042.900	1	873.645.045		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				718.750.000		754.687.500		792.421.875		832.042.900		873.645.045		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	718.750.000	1	754.687.500	1	792.421.875	1	832.042.900	1	873.645.045		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	78,92	386.927.139.400	80,42	381.703.197.000	81,92	395.180.009.723	83,42	437.002.676.440	83,42	478.929.027.254		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.050.000.000		1.102.500.000		1.157.625.000		1.215.506.250		1.276.281.562		
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1.050.000.000	1	1.102.500.000	1	1.157.625.000	1	1.215.506.250	1	1.276.281.562		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.050.000.000		1.102.500.000		1.157.625.000		1.215.506.250		1.276.281.562		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1.050.000.000	1	1.102.500.000	1	1.157.625.000	1	1.215.506.250	1	1.276.281.562	1.02.0.00.0.00.01.0024 - UPTD PUSKESMAS BARU ILIR	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	78,92	386.927.139.400	80,42	381.703.197.000	81,92	395.180.009.723	83,42	437.002.676.440	83,42	478.929.027.254		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				980.000.000		1.029.000.000		1.080.450.000		1.134.472.500		1.191.196.125		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	980.000.000	1	1.029.000.000	1	1.080.450.000	1	1.134.472.500	1	1.191.196.125		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				980.000.000		1.029.000.000		1.080.450.000		1.134.472.500		1.191.196.125		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	980.000.000	1	1.029.000.000	1	1.080.450.000	1	1.134.472.500	1	1.191.196.125		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	78,92	386.927.139.400	80,42	381.703.197.000	81,92	395.180.009.723	83,42	437.002.676.440	83,42	478.929.027.254	1.02.0.00.0.00.01.0025 - UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.569.000.000		1.647.450.000		1.729.822.500		1.816.313.625		1.907.129.306		
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1.569.000.000	1	1.647.450.000	1	1.729.822.500	1	1.816.313.625	1	1.907.129.306		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.569.000.000		1.647.450.000		1.729.822.500		1.816.313.625		1.907.129.306		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1.569.000.000	1	1.647.450.000	1	1.729.822.500	1	1.816.313.625	1	1.907.129.306		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	78,92	386.927.139.400	80,42	381.703.197.000	81,92	395.180.009.723	83,42	437.002.676.440	83,42	478.929.027.254	1.02.0.00.0.00.01.0026 - UPTD PUSKESMAS BARU ULU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.200.000.000		1.260.000.000		1.323.000.000		1.389.150.000		1.458.607.500		
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1.200.000.000	1	1.260.000.000	1	1.323.000.000	1	1.389.150.000	1	1.458.607.500		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.200.000.000		1.260.000.000		1.323.000.000		1.389.150.000		1.458.607.500		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1.200.000.000	1	1.260.000.000	1	1.323.000.000	1	1.389.150.000	1	1.458.607.500		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	78,92	386.927.139.400	80,42	381.703.197.000	81,92	395.180.009.723	83,42	437.002.676.440	83,42	478.929.027.254	1.02.0.00.0.00.01.0027 - UPTD PUSKESMAS MARGASARI	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				700.000.000		735.000.000		771.750.000		810.337.500		850.854.375		
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	700.000.000	1	735.000.000	1	771.750.000	1	810.337.500	1	850.854.375		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				700.000.000		735.000.000		771.750.000		810.337.500		850.854.375		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	700.000.000	1	735.000.000	1	771.750.000	1	810.337.500	1	850.854.375	1.02.0.00.0.00.01.0028 - UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	78,92	386.927.139.400	80,42	381.703.197.000	81,92	395.180.009.723	83,42	437.002.676.440	83,42	478.929.027.254		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
kinerja perangkat daerah														
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.900.000.000		1.995.000.000		2.094.750.000		2.199.487.500		2.309.461.875		
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1.900.000.000	1	1.995.000.000	1	2.094.750.000	1	2.199.487.500	1	2.309.461.875		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.900.000.000		1.995.000.000		2.094.750.000		2.199.487.500		2.309.461.875		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1.900.000.000	1	1.995.000.000	1	2.094.750.000	1	2.199.487.500	1	2.309.461.875		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	78,92	386.927.139.400	80,42	381.703.197.000	81,92	395.180.009.723	83,42	437.002.676.440	83,42	478.929.027.254	1.02.0.00.0.00.01.0031 - UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				92.306.878.800		72.000.000.000		72.000.000.000		72.000.000.000		72.000.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	92.306.878.800	1	72.000.000.000	1	72.000.000.000	1	72.000.000.000		72.000.000.000		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				92.306.878.800		72.000.000.000		72.000.000.000		72.000.000.000		72.000.000.000		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	92.306.878.800	1	72.000.000.000	1	72.000.000.000	1	72.000.000.000		72.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	75,92	78,92	386.927.139.400	80,42	381.703.197.000	81,92	395.180.009.723	83,42	437.002.676.440	83,42	478.929.027.254	1.02.0.00.0.00.01.0032 - UPTD-RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				11.000.000.000		11.000.000.000		14.500.000.000		17.000.000.000		21.000.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	11.000.000.000	1	11.000.000.000	1	14.500.000.000	1	17.000.000.000	1	21.000.000.000		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				11.000.000.000		11.000.000.000		14.500.000.000		17.000.000.000		21.000.000.000		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	11.000.000.000	1	11.000.000.000	1	14.500.000.000	1	17.000.000.000	1	21.000.000.000		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				255.135.977.600		438.087.500.000		432.282.769.277		398.513.850.560		364.608.448.746		
Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	82,52	255.135.977.600	83,44	438.087.500.000	84,36	432.282.769.277	85,28	398.513.850.560	86,2	364.608.448.746	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN	
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	30		45		60		70		80			
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				96.782.895.000		267.055.000.000		244.601.499.691		207.998.891.265		162.514.323.521		
Tersedianya Fasilitas kesehatan milik pemerintah kota sesuai standar Kementerian Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	-	-	96.782.895.000	-	267.055.000.000	-	244.601.499.691	1	207.998.891.265	-	162.514.323.521		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	-	-		1		-		-		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	6	3		4		4		4		4			
	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	-	2		2		1		-		-			
	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	1	1		2		1		2		2			
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	125	110		45		1.740		1.319		127			
	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	7	2		2		2		2		2			
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	2.952	1.653		2.000		2.200		2.420		2.662			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	5	3		3		2		-		-			
1.02.02.2.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya				55.000.000.000		204.255.000.000		61.157.850.200		0		0		
Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	-	2	55.000.000.000	2	204.255.000.000	1	61.157.850.200	-	0	-	0		
1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas				22.900.000.000		42.500.000.000		23.800.000.000		45.000.000.000		50.000.000.000		
Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	1	1	22.900.000.000	2	42.500.000.000	1	23.800.000.000	2	45.000.000.000	2	50.000.000.000		
1.02.02.2.01.0003 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0		0		0		16.000.000.000		0		
Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	-	-	0	-	0	-	0	1	16.000.000.000	-	0		
1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas				278.775.000		1.950.000.000		1.300.000.000		0		0		
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	5	3	278.775.000	3	1.950.000.000	2	1.300.000.000	-	0	-	0		
1.02.02.2.01.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0		1.000.000.000		0		0		650.000.000		
Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	-	-	0	1	1.000.000.000	-	0	-	0	1	650.000.000		
1.02.02.2.01.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan				1.200.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	6	3	1.200.000.000	4	2.000.000.000	4	2.000.000.000	4	2.000.000.000	4	2.000.000.000		
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				8.404.120.000		5.000.000.000		144.993.649.491		131.538.891.265		95.283.323.521		
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	125	110	8.404.120.000	45	5.000.000.000	1.740	144.993.649.491	1.319	131.538.891.265	127	95.283.323.521		
1.02.02.2.01.0015 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi				200.000.000		350.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)	1	2	200.000.000	2	350.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000		
1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				800.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.210.000.000		1.331.000.000		
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	2.952	1.653	800.000.000	2.000	1.000.000.000	2.200	1.100.000.000	2.420	1.210.000.000	2.662	1.331.000.000		
1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				8.000.000.000		9.000.000.000		10.000.000.000		12.000.000.000		13.000.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	7	2	8.000.000.000	2	9.000.000.000	2	10.000.000.000	2	12.000.000.000	2	13.000.000.000		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				118.800.000.000		125.087.500.000		139.779.769.586		141.002.134.295		150.749.125.225		
Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	0	1	118.800.000.000	1	125.087.500.000	1	139.779.769.586	1	141.002.134.295	1	150.749.125.225		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1	1				1				1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	0	1				1				1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	2	1				1				1			
	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)		1				1				1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1				1				1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1				1				1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	4	6		7		7		7		7			
	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	58	44		48		52		57		65			
	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	313.965	362.632		398.895		438.785		530.930		530.930			
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	41.011	45.705		50.276		55.303		60.833		66.917			
	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	64.605	73.625		80.988		89.086		97.995		107.794			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	20.253	20.275		22.303		24.533		26.986		29.685			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	773	878		922		968		1.016		1.066			
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	300	350		385		424		466		512			
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	18.032	19.861		19.861		19.960		19.960		19.979			
	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	22.835	20.368		20.775		20.775		21.190		21.190			
	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.200	2.500		2.550		2.600		2.650		2.700			
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	5.691	5.500		5.775		6.064		6.367		6.685			
	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	180	198		218		238		261		287			
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10.926	13.129		14.442		15.886		17.475		19.222			
	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10.441	13.070		14.377		15.815		17.396		19.136			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	4	30		31		31		32		32				
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	-	-		-		1		1		1				1
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	-	-		1		1		1		1				1
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	-	-		1		1		1		1				1
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1				1
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	4	1		1		1		1		1				1
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	101.088	122.102		134.312		147.743		162.518		178.770				
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	51.614	51.087		56.196		61.815		67.997		74.796				
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10.315	12.525		13.778		15.155		16.671		18.338				
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	3	2		2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)		1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				1.000.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000		1.400.000.000		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10.926	13.129	1.000.000.000	14.442	1.100.000.000	15.886	1.200.000.000	17.475	1.300.000.000	19.222	1.400.000.000		
1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				250.000.000		275.000.000		302.500.000		332.750.000		366.025.000		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10.441	13.070	250.000.000	14.377	275.000.000	15.815	302.500.000	17.396	332.750.000	19.136	366.025.000		
1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				450.000.000		475.000.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10.315	12.525	450.000.000	13.778	475.000.000	15.155	500.000.000	16.671	550.000.000	18.338	600.000.000		
1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				500.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		725.000.000		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	51.614	51.087	500.000.000	56.196	600.000.000	61.815	650.000.000	67.997	700.000.000	74.796	725.000.000		
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				800.000.000		825.000.000		850.000.000		900.000.000		950.000.000		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	101.088	122.102	800.000.000	134.312	825.000.000	147.743	850.000.000	162.518	900.000.000	178.770	950.000.000		
1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	313.965	362.632	1.400.000.000	398.895	1.400.000.000	438.785	1.400.000.000	530.930	1.400.000.000	530.930	1.400.000.000		
1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.210.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kesehatan pada Usia Lanjut														
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	41.011	45.705	1.000.000.000	50.276	1.000.000.000	55.303	1.000.000.000	60.833	1.100.000.000	66.917	1.210.000.000		
1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	64.605	73.625	500.000.000	80.988	500.000.000	89.086	500.000.000	97.995	500.000.000	107.794	500.000.000		
1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				500.000.000		500.000.000		550.000.000		550.000.000		600.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	20.253	20.275	500.000.000	22.303	500.000.000	24.533	550.000.000	26.986	550.000.000	29.685	600.000.000		
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				300.000.000		315.000.000		330.000.000		345.000.000		360.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	773	878	300.000.000	922	315.000.000	968	330.000.000	1.016	345.000.000	1.066	360.000.000		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	18.032	19.861	1.500.000.000	19.861	1.500.000.000	19.960	1.500.000.000	19.960	1.500.000.000	19.979	1.500.000.000		
1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	22.835	20.368	800.000.000	20.775	800.000.000	20.775	800.000.000	21.190	800.000.000	21.190	800.000.000		
1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
1.02.02.2.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				150.000.000		165.000.000		180.000.000		198.000.000		210.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	0	1	150.000.000	1	165.000.000	1	180.000.000	1	198.000.000	1	210.000.000		
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				3.000.000.000		5.000.000.000		6.000.000.000		6.500.000.000		7.000.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	2	1	3.000.000.000	1	5.000.000.000	1	6.000.000.000	1	6.500.000.000	1	7.000.000.000		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				250.000.000		275.000.000		300.000.000		325.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1	250.000.000	1	275.000.000	1	300.000.000	1	325.000.000	1	350.000.000		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				500.000.000		525.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1	500.000.000	1	525.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000		
1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3.500.000.000		800.000.000		3.800.000.000		1.000.000.000		4.000.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	1	3.500.000.000	1	800.000.000	1	3.800.000.000	1	1.000.000.000	1	4.000.000.000		
1.02.02.2.02.0019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya				100.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000		
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				250.000.000		275.000.000		283.872.086		312.259.295		343.485.225		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1	250.000.000	1	275.000.000	1	283.872.086	1	312.259.295	1	343.485.225		
1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				175.000.000		185.000.000		195.000.000		205.000.000		215.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	5.691	5.500	175.000.000	5.775	185.000.000	6.064	195.000.000	6.367	205.000.000	6.685	215.000.000		
1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				100.000.000		110.000.000		125.000.000		150.000.000		165.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	58	44	100.000.000	48	110.000.000	52	125.000.000	57	150.000.000	65	165.000.000		
1.02.02.2.02.0024 - Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				75.000.000		82.500.000		90.750.000		99.825.000		105.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	0	1	75.000.000	1	82.500.000	1	90.750.000	1	99.825.000	1	105.000.000		
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2.000.000.000		2.300.000.000		2.500.000.000		2.750.000.000		3.000.000.000		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	3	2	2.000.000.000	2	2.300.000.000	2	2.500.000.000	2	2.750.000.000	2	3.000.000.000		
1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				95.000.000.000		100.000.000.000		105.000.000.000		110.000.000.000		115.000.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12	1	95.000.000.000	1	100.000.000.000	1	105.000.000.000	1	110.000.000.000	1	115.000.000.000		
1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		380.000.000		
Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	380.000.000		
1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit				0		0		4.677.647.500		2.000.000.000		2.000.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	-	-	0	-	0	1	4.677.647.500	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				0		500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	-	-	0	1	500.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000		
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0		2.000.000.000		2.000.000.000		2.100.000.000		2.125.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	-	-	0	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.100.000.000	1	2.125.000.000		
1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				200.000.000		300.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	4	30	200.000.000	31	300.000.000	31	350.000.000	32	350.000.000	32	350.000.000		
1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				2.500.000.000		700.000.000		750.000.000		700.000.000		750.000.000		
Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1	1	2.500.000.000	1	700.000.000	1	750.000.000	1	700.000.000	1	750.000.000		
1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				300.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.200	2.500	300.000.000	2.550	550.000.000	2.600	600.000.000	2.650	650.000.000	2.700	700.000.000		
1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				200.000.000		220.000.000		240.000.000		260.000.000		280.000.000		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	180	198	200.000.000	218	220.000.000	238	240.000.000	261	260.000.000	287	280.000.000		
1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				150.000.000		165.000.000		181.500.000		199.650.000		219.615.000		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	300	350	150.000.000	385	165.000.000	424	181.500.000	466	199.650.000	512	219.615.000		
1.02.02.2.02.0043 - Pengelolaan Kawasan tanpa rokok				150.000.000		165.000.000		181.500.000		199.650.000		250.000.000		
Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	4	6	150.000.000	7	165.000.000	7	181.500.000	7	199.650.000	7	250.000.000		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				250.000.000		275.000.000		300.000.000		350.000.000		385.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	4	1	250.000.000	1	275.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	385.000.000		
1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi				350.000.000		385.000.000		400.000.000		425.000.000		450.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)		1	350.000.000	1	385.000.000	1	400.000.000	1	425.000.000	1	450.000.000		
1.02.02.2.02.0050 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				200.000.000		220.000.000		242.000.000		250.000.000		260.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)		1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	1	250.000.000	1	260.000.000		
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				1.078.349.000		1.500.000.000		1.750.000.000		1.750.000.000		2.000.000.000		
Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	1	1.078.349.000	1	1.500.000.000	1	1.750.000.000	1	1.750.000.000	1	2.000.000.000		
1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1.078.349.000		1.500.000.000		1.750.000.000		1.750.000.000		2.000.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	1	1.078.349.000	1	1.500.000.000	1	1.750.000.000	1	1.750.000.000	1	2.000.000.000		
1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				800.000.000		675.000.000		731.500.000		792.825.000		870.000.000		
Terlaksananya penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	1	1	800.000.000	1	675.000.000	1	731.500.000	1	792.825.000	1	870.000.000		
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	114	28		29		30		30		30			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	28	28		29		29		30		30			
	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	15	17		17		19		21		22			
1.02.02.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya				75.000.000		82.500.000		90.750.000		99.825.000		100.000.000		
Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	15	17	75.000.000	17	82.500.000	19	90.750.000	21	99.825.000	22	100.000.000		
1.02.02.2.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000		82.500.000		90.750.000		108.000.000		120.000.000		
Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	28	28	75.000.000	29	82.500.000	29	90.750.000	30	108.000.000	30	120.000.000		
1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				300.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	114	28	300.000.000	29	150.000.000	30	175.000.000	30	200.000.000	30	250.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.04.0004 - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				350.000.000		360.000.000		375.000.000		385.000.000		400.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PUSKESMAS MANGGAR	
Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	1	1	350.000.000	1	360.000.000	1	375.000.000	1	385.000.000	1	400.000.000		
Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	82,52	255.135.977.600	83,44	438.087.500.000	84,36	432.282.769.277	85,28	398.513.850.560	86,2	364.608.448.746		
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	30		45		60		70		80			
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		750.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0002 - UPTD PUSKESMAS TERITIP	
Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000	1	750.000.000		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		750.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000	1	750.000.000		
Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	30	255.135.977.600	45	438.087.500.000	60	432.282.769.277	70	398.513.850.560	80	364.608.448.746		
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2			
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				400.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	400.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0003 - UPTD PUSKESMAS LAMARU	
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				400.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	400.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000		
Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	30	255.135.977.600	45	438.087.500.000	60	432.282.769.277	70	398.513.850.560	80	364.608.448.746		
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100		100		100		100		100			
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		750.000.000		
Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000	1	750.000.000		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		750.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000	1	750.000.000		
Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	255.135.977.600	100	438.087.500.000	100	432.282.769.277	100	398.513.850.560	100	364.608.448.746	1.02.0.00.0.00.01.0004 - UPTD PUSKESMAS MANGGAR BARU	
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2			
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	30		45		60		70		80			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan				1.750.000.000		1.800.000.000		1.850.000.000		1.900.000.000		1.950.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													1.02.0.00.0.00.01.0005 - UPTD PUSKESMAS SEPINGGAN	
Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	1.750.000.000	1	1.800.000.000	1	1.850.000.000	1	1.900.000.000	1	1.950.000.000		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				1.750.000.000		1.800.000.000		1.850.000.000		1.900.000.000		1.950.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	1.750.000.000	1	1.800.000.000	1	1.850.000.000	1	1.900.000.000	1	1.950.000.000		
Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	30	255.135.977.600	45	438.087.500.000	60	432.282.769.277	70	398.513.850.560	80	364.608.448.746	1.02.0.00.0.00.01.0006 - UPTD PUSKESMAS GUNUNG BAHAGIA	
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2			
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.000.000.000		2.050.000.000		2.100.000.000		2.150.000.000		2.200.000.000		
Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	2.000.000.000	1	2.050.000.000	1	2.100.000.000	1	2.150.000.000	1	2.200.000.000		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				2.000.000.000		2.050.000.000		2.100.000.000		2.150.000.000		2.200.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	2.000.000.000	1	2.050.000.000	1	2.100.000.000	1	2.150.000.000	1	2.200.000.000		
Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	30	255.135.977.600	45	438.087.500.000	60	432.282.769.277	70	398.513.850.560	80	364.608.448.746	1.02.0.00.0.00.01.0006 - UPTD PUSKESMAS GUNUNG BAHAGIA	
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2			
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		750.000.000		
Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000	1	750.000.000		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		750.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000	1	750.000.000		
Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	82,52	255.135.977.600	83,44	438.087.500.000	84,36	432.282.769.277	85,28	398.513.850.560	86,2	364.608.448.746	1.02.0.00.0.00.01.0007 - UPTD PUSKESMAS DAMAI	
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	30		45		60		70		80			
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		750.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0008 - UPTD PUSKESMAS KLANDASAN ILIR	
Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000	1	750.000.000		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		750.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000	1	750.000.000		
Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	255.135.977.600	100	438.087.500.000	100	432.282.769.277	100	398.513.850.560	100	364.608.448.746		
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	30		45		60		70		80			
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis	63,31	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)													
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.800.000.000		1.850.000.000		1.900.000.000		1.950.000.000		2.000.000.000		
Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	1.800.000.000	1	1.850.000.000	1	1.900.000.000	1	1.950.000.000	1	2.000.000.000		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				1.800.000.000		1.850.000.000		1.900.000.000		1.950.000.000		2.000.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	1.800.000.000	1	1.850.000.000	1	1.900.000.000	1	1.950.000.000	1	2.000.000.000		
Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	30	255.135.977.600	45	438.087.500.000	60	432.282.769.277	70	398.513.850.560	80	364.608.448.746	1.02.0.00.0.00.01.0009 - UPTD PUSKESMAS PRAPATAN	
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100		100		100		100		100			
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				450.000.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		
Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	450.000.000	1	500.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				450.000.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	450.000.000	1	500.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000		
Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	30	255.135.977.600	45	438.087.500.000	60	432.282.769.277	70	398.513.850.560	80	364.608.448.746	1.02.0.00.0.00.01.0010 - UPTD PUSKESMAS TELAGASARI	
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		
Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	500.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	500.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000		
Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	82,52	255.135.977.600	83,44	438.087.500.000	84,36	432.282.769.277	85,28	398.513.850.560	86,2	364.608.448.746	1.02.0.00.0.00.01.0011 - UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ILIR	
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	30		45		60		70		80			
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		
Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	500.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000		650.000.000		700.000.000		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	500.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000		650.000.000		700.000.000		
Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	30	255.135.977.600	45	438.087.500.000	60	432.282.769.277	70	398.513.850.560	80	364.608.448.746	1.02.0.00.0.00.01.0012 - UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ULU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100		100		100		100		100			
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				450.000.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		
Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	450.000.000	1	500.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				450.000.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	450.000.000	1	500.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000		
Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	82,52	255.135.977.600	83,44	438.087.500.000	84,36	432.282.769.277	85,28	398.513.850.560	86,2	364.608.448.746		
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	30		45		60		70		80			
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.800.000.000		1.850.000.000		1.900.000.000		1.950.000.000		2.000.000.000		
Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	1.800.000.000	1	1.850.000.000	1	1.900.000.000	1	1.950.000.000	1	2.000.000.000		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				1.800.000.000		1.850.000.000		1.900.000.000		1.950.000.000		2.000.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	1.800.000.000	1	1.850.000.000	1	1.900.000.000	1	1.950.000.000	1	2.000.000.000		
Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	30	255.135.977.600	45	438.087.500.000	60	432.282.769.277	70	398.513.850.560	80	364.608.448.746	1.02.0.00.0.00.01.0014 - UPTD PUSKESMAS KARANG JATI	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2					
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100		100		100		100		100					
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				700.000.000		700.000.000		750.000.000		800.000.000		850.000.000				
Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	700.000.000	1	700.000.000	1	750.000.000	1	800.000.000	1	850.000.000				
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				700.000.000		700.000.000		750.000.000		800.000.000		850.000.000				
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	700.000.000	1	700.000.000	1	750.000.000	1	800.000.000	1	850.000.000				
Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	255.135.977.600	100	438.087.500.000	100	432.282.769.277	100	398.513.850.560	100	364.608.448.746			1.02.0.00.0.00.01.0015 - UPTD PUSKESMAS KARANG REJO	
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2					
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	30		45		60		70		80					
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				425.000.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000				
Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	425.000.000	1	500.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000				
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				425.000.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000				
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	425.000.000	1	500.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	82,52	255.135.977.600	83,44	438.087.500.000	84,36	432.282.769.277	85,28	398.513.850.560	86,2	364.608.448.746	1.02.0.00.0.00.01.0016 - UPTD PUSKESMAS SUMBER REJO			
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	30		45		60		70		80					
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100		100		100		100							
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				450.000.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000				
Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	450.000.000	1	500.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000				
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				450.000.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000				
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	450.000.000	1	500.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000				
Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	255.135.977.600	100	438.087.500.000	100	432.282.769.277	100	398.513.850.560	100	364.608.448.746	1.02.0.00.0.00.01.0017 - UPTD PUSKESMAS MUARA RAPAK			
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	30		45		60		70		80					
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2					
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		750.000.000				
Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000	1	750.000.000				
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		750.000.000				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000	1	750.000.000		
Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	255.135.977.600	100	438.087.500.000	100	432.282.769.277	100	398.513.850.560	100	364.608.448.746	1.02.0.00.0.00.01.0018 - UPTD PUSKESMAS GUNUNG SAMARINDA	
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	30		45		60		70		80			
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				600.000.000		650.000.000		700.000.000		750.000.000		800.000.000		
Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000	1	750.000.000	1	800.000.000		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				600.000.000		650.000.000		700.000.000		750.000.000		800.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000	1	750.000.000	1	800.000.000		
Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	255.135.977.600	100	438.087.500.000	100	432.282.769.277	100	398.513.850.560	100	364.608.448.746	1.02.0.00.0.00.01.0019 - UPTD PUSKESMAS BATU AMPAR	
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	30		45		60		70		80			
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		
Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	500.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0020 - UPTD PUSKESMAS GRAHA INDAH	
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	500.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000		
Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	255.135.977.600	100	438.087.500.000	100	432.282.769.277	100	398.513.850.560	100	364.608.448.746		
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2			
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	30		45		60		70		80			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		750.000.000		
Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		750.000.000		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		750.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		750.000.000		
Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	30	255.135.977.600	45	438.087.500.000	60	432.282.769.277	70	398.513.850.560	80	364.608.448.746	1.02.0.00.0.00.01.0021 - UPTD PUSKESMAS KARANG JOANG	
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2			
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100		100		100		100					
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.200.000.000		2.250.000.000		2.300.000.000		2.350.000.000		2.400.000.000		
Tersedianya Layanan Kesehatan yang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	2.200.000.000	1	2.250.000.000	1	2.300.000.000	1	2.350.000.000	1	2.400.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
menerapkan standar pelayanan														
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				2.200.000.000		2.250.000.000		2.300.000.000		2.350.000.000		2.400.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	2.200.000.000	1	2.250.000.000	1	2.300.000.000	1	2.350.000.000	1	2.400.000.000		
Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	255.135.977.600	100	438.087.500.000	100	432.282.769.277	100	398.513.850.560	100	364.608.448.746	1.02.0.00.0.00.01.0022 - UPTD PUSKESMAS KARIANGAU	
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2			
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	30		45		60		70		80			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.000.000.000		2.050.000.000		2.100.000.000		2.150.000.000		2.200.000.000		
Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		2.000.000.000	1	2.050.000.000	1	2.100.000.000	1	2.150.000.000	1	2.200.000.000		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				2.000.000.000		2.050.000.000		2.100.000.000		2.150.000.000		2.200.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1		2.000.000.000	1	2.050.000.000	1	2.100.000.000	1	2.150.000.000	1	2.200.000.000		
Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	30	255.135.977.600	45	438.087.500.000	60	432.282.769.277	70	398.513.850.560	80	364.608.448.746	1.02.0.00.0.00.01.0023 - UPTD PUSKESMAS MARGO MULYO	
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100		100		100		100		100			
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				600.000.000		650.000.000		700.000.000		750.000.000		800.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000	1	750.000.000	1	800.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0024 - UPTD PUSKESMAS BARU ILIR	
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				600.000.000		650.000.000		700.000.000		750.000.000		800.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000	1	750.000.000	1	800.000.000		
Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	30	255.135.977.600	45	438.087.500.000	60	432.282.769.277	70	398.513.850.560	80	364.608.448.746		
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2			
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				450.000.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		
Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	450.000.000	1	500.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				450.000.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	450.000.000	1	500.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0025 - UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH	
Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	82,52	255.135.977.600	83,44	438.087.500.000	84,36	432.282.769.277	85,28	398.513.850.560	86,2	364.608.448.746		
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	30		45		60		70		80			
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		750.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000	1	750.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0026 - UPTD PUSKESMAS BARU ULU	
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		750.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000	1	750.000.000		
Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	30	255.135.977.600	45	438.087.500.000	60	432.282.769.277	70	398.513.850.560	80	364.608.448.746		
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100		100		100		100		100			
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.100.000.000		2.150.000.000		2.200.000.000		2.250.000.000		2.300.000.000		
Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	2.100.000.000	1	2.150.000.000	1	2.200.000.000	1	2.250.000.000	1	2.300.000.000		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				2.100.000.000		2.150.000.000		2.200.000.000		2.250.000.000		2.300.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	2.100.000.000	1	2.150.000.000	1	2.200.000.000	1	2.250.000.000	1	2.300.000.000		
Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	255.135.977.600	100	438.087.500.000	100	432.282.769.277	100	398.513.850.560	100	364.608.448.746	1.02.0.00.0.00.01.0027 - UPTD PUSKESMAS MARGASARI	
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	30		45		60		70		80			
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan				500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	500.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	500.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000		
Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	82,52	255.135.977.600	83,44	438.087.500.000	84,36	432.282.769.277	85,28	398.513.850.560	86,2	364.608.448.746	1.02.0.00.0.00.01.0028 - UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	30		45		60		70		80			
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100		100		100		100					
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.100.000.000		2.100.000.000		2.200.000.000		2.250.000.000		2.300.000.000		
Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	3	1	2.100.000.000	1	2.100.000.000	1	2.200.000.000	1	2.250.000.000	1	2.300.000.000		
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2.100.000.000		2.100.000.000		2.200.000.000		2.250.000.000		2.300.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	3	1	2.100.000.000	1	2.100.000.000	1	2.200.000.000	1	2.250.000.000	1	2.300.000.000		
Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	255.135.977.600	100	438.087.500.000	100	432.282.769.277	100	398.513.850.560	100	364.608.448.746	1.02.0.00.0.00.01.0029 - UPTD INSTALASI FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2					
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	30		45		60		70		80					
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.220.000.000		1.220.000.000		1.320.000.000		1.420.000.000		1.500.000.000				
Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1	1.220.000.000	1	1.220.000.000	1	1.320.000.000	1	1.420.000.000	1	1.500.000.000				
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1.220.000.000		1.220.000.000		1.320.000.000		1.420.000.000		1.500.000.000				
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1	1.220.000.000	1	1.220.000.000	1	1.320.000.000	1	1.420.000.000	1	1.500.000.000				
Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	255.135.977.600	100	438.087.500.000	100	432.282.769.277	100	398.513.850.560	100	364.608.448.746	1.02.0.00.0.00.01.0030 - UPTD Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)			
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2					
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	30		45		60		70		80					
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.000.000.000		2.000.000.000		2.100.000.000		2.150.000.000		2.175.000.000				
Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.100.000.000	1	2.150.000.000	1	2.175.000.000				
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2.000.000.000		2.000.000.000		2.100.000.000		2.150.000.000		2.175.000.000				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.100.000.000	1	2.150.000.000	1	2.175.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0031 - UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	30	255.135.977.600	45	438.087.500.000	60	432.282.769.277	70	398.513.850.560	80	364.608.448.746		
	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100		100		100		100		100			
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				6.329.733.600		11.000.000.000		11.000.000.000		11.000.000.000		11.000.000.000		
Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	2	1	6.329.733.600	1	11.000.000.000	1	11.000.000.000	1	11.000.000.000	1	11.000.000.000		
1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit				6.329.733.600		11.000.000.000		11.000.000.000		11.000.000.000		11.000.000.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	2	1	6.329.733.600	1	11.000.000.000	1	11.000.000.000	1	11.000.000.000	1	11.000.000.000		
Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan (%)	107	100	255.135.977.600	100	438.087.500.000	100	432.282.769.277	100	398.513.850.560	100	364.608.448.746	1.02.0.00.0.00.01.0032 - UPTD-RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU	
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	30		45		60		70		80			
	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) (Persentase)	63,31	82,52		83,44		84,36		85,28		86,2			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		
Tersedianya Layanan Kesehatan yang menerapkan standar pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit				2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000				
Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000				
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				1.570.000.000		1.427.500.000		1.533.500.000		1.537.500.000		1.544.000.000				
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. (%)	85,19	86,2	1.570.000.000	87,32	1.427.500.000	88,3	1.533.500.000	89,2	1.537.500.000	90,02	1.544.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN			
	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100					
	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	100	100		100		100		100		100					
1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				175.000.000		220.000.000		220.000.000		223.500.000		223.500.000				
Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)		1	175.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000	1	223.500.000	1	223.500.000				
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1					
1.02.03.2.01.0001 - Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				75.000.000		70.000.000		70.000.000		71.500.000		71.500.000				
Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)		1	75.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	71.500.000	1	71.500.000				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.03.2.01.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				100.000.000		150.000.000		150.000.000		152.000.000		152.000.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	152.000.000	1	152.000.000		
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				170.000.000		107.500.000		113.500.000		114.000.000		120.500.000		
Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	2	170.000.000	2	107.500.000	2	113.500.000	2	114.000.000	2	120.500.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	15	11		11		12		12		13			
1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				70.000.000		70.000.000		75.000.000		75.000.000		80.000.000		
Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	2	70.000.000	2	70.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	80.000.000		
1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				20.000.000		20.000.000		21.000.000		21.000.000		22.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	15	11	20.000.000	11	20.000.000	12	21.000.000	12	21.000.000	13	22.500.000		
1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				80.000.000		17.500.000		17.500.000		18.000.000		18.000.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1	80.000.000	1	17.500.000	1	17.500.000	1	18.000.000	1	18.000.000		
1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.225.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	302	320	1.225.000.000	330	1.100.000.000	340	1.200.000.000	360	1.200.000.000	370	1.200.000.000		
1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.225.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	302	320	1.225.000.000	330	1.100.000.000	340	1.200.000.000	360	1.200.000.000	370	1.200.000.000		
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				1.135.000.000		1.405.000.000		1.605.000.000		1.650.000.000		1.850.000.000		
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh	100	100	1.135.000.000	100	1.405.000.000	100	1.605.000.000	100	1.650.000.000	100	1.850.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pemerintah Daerah (Persentase)													
	Persentase Dokumen Hasil pengawasan Perusahaan Rumah Tangga Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang ditindakanjuti (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				350.000.000		450.000.000		475.000.000		475.000.000		500.000.000		
Terlaksananya pemberian rekomendasi Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT yang sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	1	1	350.000.000	1	450.000.000	1	475.000.000	1	475.000.000	1	500.000.000		
1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				350.000.000		450.000.000		475.000.000		475.000.000		500.000.000		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	1	1	350.000.000	1	450.000.000	1	475.000.000	1	475.000.000	1	500.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.04.2.02 - Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				200.000.000		225.000.000		250.000.000		275.000.000		300.000.000		
Terlaksananya pemberian Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang sesuai standar	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen)	2	1	200.000.000	1	225.000.000	1	250.000.000	1	275.000.000	1	300.000.000		
1.02.04.2.02.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				200.000.000		225.000.000		250.000.000		275.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen)	2	1	200.000.000	1	225.000.000	1	250.000.000	1	275.000.000	1	300.000.000		
1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				300.000.000		350.000.000		400.000.000		400.000.000		450.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1	1	300.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000		
1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				300.000.000		350.000.000		400.000.000		400.000.000		450.000.000		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1	1	300.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000		
1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				75.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000		200.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	1	1	75.000.000	1	100.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000		
1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				75.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	1	1	75.000.000	1	100.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000		
1.02.04.2.05 - Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				60.000.000		80.000.000		80.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	1	1	60.000.000	1.000.000	80.000.000	1	80.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.04.2.05.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				60.000.000		80.000.000		80.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	1	1	60.000.000	1.000.000	80.000.000	1	80.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				150.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	225	200	150.000.000	200	200.000.000	225	250.000.000	225	250.000.000	250	300.000.000		
1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				150.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	225	200	150.000.000	200	200.000.000	225	250.000.000	225	250.000.000	250	300.000.000		
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				2.900.000.000		3.090.553.000		3.369.609.000		3.606.570.000		3.802.227.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (Persentase)	100	100	2.900.000.000	100	3.090.553.000	100	3.369.609.000	100	3.606.570.000	100	3.802.227.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN	
1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.200.000.000		2.300.000.000		2.500.000.000		2.650.000.000		2.750.000.000		
Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)		4	2.200.000.000	3	2.300.000.000	3	2.500.000.000	3	2.650.000.000	3	2.750.000.000		
1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				2.200.000.000		2.300.000.000		2.500.000.000		2.650.000.000		2.750.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)		4	2.200.000.000	3	2.300.000.000	3	2.500.000.000	3	2.650.000.000	3	2.750.000.000		
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				350.000.000		405.553.000		446.109.000		490.720.000		539.792.000		
Terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)		1	350.000.000	1	405.553.000	1	446.109.000	1	490.720.000	1	539.792.000		
1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				350.000.000		405.553.000		446.109.000		490.720.000		539.792.000		
Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)		1	350.000.000	1	405.553.000	1	446.109.000	1	490.720.000	1	539.792.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				350.000.000		385.000.000		423.500.000		465.850.000		512.435.000		
Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		1	350.000.000	1	385.000.000	1	423.500.000	1	465.850.000	1	512.435.000		
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				350.000.000		385.000.000		423.500.000		465.850.000		512.435.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		1	350.000.000	1	385.000.000	1	423.500.000	1	465.850.000	1	512.435.000		

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN				
1.	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	
			1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas	
			1.02.02.2.01.0003 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
			1.02.02.2.01.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			1.02.02.2.01.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
			1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			1.02.02.2.01.0015 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	
			1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
			1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
			1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
			1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
			1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
			1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
			1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
			1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
			1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
			1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
			1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
			1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
			1.02.02.2.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
			1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
			1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
			1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
			1.02.02.2.02.0019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
			1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
			1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
			1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
			1.02.02.2.02.0024 - Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	
			1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
			1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
			1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
			1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
			1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
			1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	
			1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
			1.02.02.2.02.0043 - Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	
			1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
			1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi	
			1.02.02.2.02.0050 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	
			1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
			1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
			1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	
			1.02.02.2.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
			1.02.02.2.04.0004 - Penyiapan Perumusan dan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
2.	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
			1.02.03.2.01.0001 - Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
			1.02.03.2.01.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
			1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
			1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
3.	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
			1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
			1.02.04.2.02 - Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	
			1.02.04.2.02.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
			1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
			1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
			1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
			1.02.04.2.05 - Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
			1.02.04.2.05.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
			1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
			1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
4.	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
			1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
1.02.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PUSKESMAS MANGGAR				
5.	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya mutu kesehatan perorangan dan masyarakat	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0002 - UPTD PUSKESMAS TERITIP				
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0003 - UPTD PUSKESMAS LAMARU				
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0004 - UPTD PUSKESMAS MANGGAR BARU				
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0005 - UPTD PUSKESMAS SEPINGGAN				
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0006 - UPTD PUSKESMAS GUNUNG BAHAGIA				
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0007 - UPTD PUSKESMAS DAMAI				
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0008 - UPTD PUSKESMAS KLANDASAN ILIR				
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0009 - UPTD PUSKESMAS PRAPATAN				
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0010 - UPTD PUSKESMAS TELAGASARI				
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0011 - UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ILIR				
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0012 - UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ULU				
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0013 - UPTD PUSKESMAS MEKARSARI				
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0014 - UPTD PUSKESMAS KARANG JATI				
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0015 - UPTD PUSKESMAS KARANG REJO				
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.02.0.00.0.00.01.0016 - UPTD PUSKESMAS SUMBER REJO				
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0017 - UPTD PUSKESMAS MUARA RAPAK				
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0018 - UPTD PUSKESMAS GUNUNG SAMARINDA				
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0019 - UPTD PUSKESMAS BATU AMPAR				
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0020 - UPTD PUSKESMAS GRAHA INDAH				
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0021 - UPTD PUSKESMAS KARANG JOANG				
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0022 - UPTD PUSKESMAS KARIANGAU				
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0023 - UPTD PUSKESMAS MARGO MULYO				
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0024 - UPTD PUSKESMAS BARU ILIR				

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0025 - UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH				
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0026 - UPTD PUSKESMAS BARU ULU				
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0027 - UPTD PUSKESMAS MARGASARI				
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0028 - UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH				
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
1.02.0.00.0.00.01.0029 - UPTD INSTALASI FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN				
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
1.02.0.00.0.00.01.0030 - UPTD Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)				
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
1.02.0.00.0.00.01.0031 - UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH				
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
1.02.0.00.0.00.01.0032 - UPTD-RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU				
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	

**4.5 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan**

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 18 tahun 2020 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah perlu menyampaikan dan melaporkan hasil kinerja sebagai pertanggungjawaban dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang harus dijabarkan dalam dokumen RENSTRA perangkat daerah sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari perangkat daerah. Adapun kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peran perangkat daerah dinilai atas capaian akuntabilitas kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan sebagai indikator yang tertuang pada dokumen perencanaan perangkat daerah.

Akuntabilitas kinerja pada IKU merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang terkait berhasil atau tidaknya pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan kepada pihak pihak yang berwenag menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Dalam hal akuntabilitas kinerja perangkat daerah Dinas Kesehatan kota Balikpapan adalah antara Kepala Perangkat Daerah dengan Wali Kota Balikpapan. Perwujudan akuntabilitas kinerja tersebut melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya laporan tersebut memeberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui perjanjian kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Wali Kota Balikpapan.

Penetapan Indikator Kinerja dari perangkat daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan untuk Tahun 2025-2030 merupakan penjabaran dari indikator kinerja Sasaran yang sudah disepakati bersama sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan pada Tahun 2025-2030 untuk 3 (tiga) urusan yang

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kab/ Kota melalui peran Perangkat Daerah. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada perangkat daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan pada Tahun 2025-2030 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD kota Balikpapan pada tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian kinerja perangkat daerah. IKU tersebut ditetapkan sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk satu periode kedepan. Berikut ini disajikan tabel IKU dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN									
1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	75,87	75,94	76	76,23	76,47	76,7	76,94	
2.	Jumlah Kematian Ibu	Jiwa	9	5	5	5	4	4	4	
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,45	81,45	81,76	81,87	81,99	82,12	82,25	
4.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	24,8	23,06	21,45	19,95	18,55	17,25	16,05	
5.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	(%)	84	84,98	85,73	86,48	87,23	87,98	88,74	
6.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	104	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	

4.6 Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci, atau yang lebih dikenal dengan singkatan IKK, adalah seperangkat ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks pemerintahan, IKK berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam pemerintahan Indonesia, IKK telah menjadi bagian integral dari sistem perencanaan dan evaluasi kinerja. Hal ini tertuang dalam berbagai regulasi, termasuk Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. IKK tidak hanya sekadar angka atau statistik, melainkan cerminan dari prioritas strategis dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu

organisasi pemerintah. Indikator ini dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur tentang tingkat pencapaian suatu program atau kebijakan. Berikut adalah Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Kota Balikpapan:

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	positif	(tahun)	75,87	75,94	76	76,23	76,47	76,7	76,94	
2.	Jumlah Kematian Ibu	negatif	Jiwa	9	5	5	5	4	4	4	
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	positif	Nilai	81,45	81,45	81,76	81,87	81,99	82,12	82,25	
4.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	negatif	%	24,8	23,06	21,45	19,95	18,55	17,25	16,05	
5.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	positif	(%)	84	84,98	85,73	86,48	87,23	87,98	88,74	
6.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	positif	(%)	104	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	
7.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan	positif	%	107	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	positif	Indeks	75,92	77,42	78,92	80,42	81,92	83,42	83,42	
10.	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
11.	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	positif	Persentase	10	20	30	40	50	60	70	
12.	Persentase Dokumen Hasil pengawasan Perusahaan Rumah Tangga Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang ditindaklanjuti	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
13.	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	positif	Persentase	-	15	30	45	60	70	80	
14.	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar.	positif	%	85,19	85,19	86,2	87,32	88,3	89,2	90,02	
15.	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC)	positif	Persentase	63,31	81,6	82,52	83,44	84,36	85,28	86,2	
17.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
18.	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	positif	%	80	82	85	87	90	92	95	
19.	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	positif	%	0	20	50	60	75	85	95	
20.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
21.	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	positif	%	93	94	95	96	97	98	100	
22.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	positif	%	78	81,3	84,5	87,6	90,7	93,8	96,1	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	%	81,38	82	82,5	83	83,5	84	84,5	
24.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	positif	%	86,05	87	87,5	88	88,5	89	89,5	
25.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
26.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
27.	Persentase lanjut usia yang mandiri	positif	%	95,43	96	96,5	97	97,5	98	98,5	
28.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	positif	Orang	13,76	13,77	13,78	13,8	13,83	13,86	13,88	
29.	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	negatif	%	22,97	22,8	22,65	22,5	22,35	22,2	22,05	
30.	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	negatif	%	18,3	18,15	18	17,85	17,7	17,55	17,4	
31.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
33.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
34.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
35.	Persentase pangan industri rumah tanggan aman dan bermutu	positif	%	70	72	75	78	80	82	85	
36.	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
37.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP IRT sesuai standar	positif	%	70	72	75	78	80	82	85	
39.	Kejadian Malaria per 1000 orang.	negatif	Kasus	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	
40.	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.	negatif	Orang	20	18	16	14	12	10	10	
41.	Jumlah kematian balita	negatif	Jiwa	90	89	88	87	86	85	84	
42.	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	positif	%	93,75	100	100	100	100	100	100	
43.	Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	positif	%	81,5	83	85	87	90	93	95	
44.	Persentase rumah tangga yang mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka	negatif	%	0	0	0	0	0	0	0	
45.	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	positif	%	70	72	75	78	80	82	85	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	positif	%	70,74	72	74	76	80	83	85	
47.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
48.	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi	negatif	Orang	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31	0,28	0,25	
49.	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun	negatif	%	7,03	7	6,75	6,5	6,25	6	5,8	
50.	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	negatif	%	2,2	2,1	2	1,9	1,8	1,7	1,6	
51.	Prevalensi Obesitas > 18 tahun	negatif	%	4,97	4,85	4,7	4,55	4,4	4,25	4,1	
52.	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	negatif	Kasus	367	330	297	268	241	193	154	
53.	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	negatif	%	9,4	9,09	8,5	7,95	7,43	6,95	6,5	
54.	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	positif	%	57,1	58	60	62	64	66	68	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	positif	%	98,4	98,5	98,6	98,7	98,8	98,9	99	
56.	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional	positif	%	58,03	63,33	70	76,67	83,33	90	90	
57.	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	positif	Rasio	2,767	2,768	2,769	2,77	2,771	2,772	2,773	
58.	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	positif	Per 1000 Penduduk	13,76	13,77	13,78	13,8	13,83	13,86	13,88	
59.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
60.	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	positif	Nilai	84,58	85,18	85,86	86,55	87,24	87,94	88,64	
61.	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	positif	%	83,69	83,96	84,96	85,96	86,96	87,96	88,96	
62.	Cakupan imunisasi bayi lengkap	positif	%	95	95	95	95	95	95	95	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam mewujudkan visi pembangunan kesehatan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan capaian kinerja sebelumnya, tantangan strategis, serta peluang inovasi di sektor kesehatan. Renstra ini dirancang untuk memastikan optimalisasi penggunaan anggaran yang berorientasi pada outcome dan dampak kesehatan masyarakat.

Keberhasilan implementasi Renstra ini sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi profesi kesehatan, tokoh masyarakat, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta, sebagaimana telah diurai dalam analisis keterlibatan multisektor. Struktur sosial budaya masyarakat Kota Balikpapan yang multietnis dan dinamis menjadi pertimbangan utama dalam merancang intervensi kesehatan yang inklusif dan responsif terhadap nilai-nilai lokal.

Dinas Kesehatan Kota Balikpapan menyadari bahwa tantangan ke depan akan semakin kompleks, mulai dari beban ganda penyakit, disparitas akses layanan kesehatan, hingga dampak perubahan iklim terhadap kesehatan. Oleh karena itu, sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan akan diterapkan untuk memastikan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai target, serta memiliki mekanisme adaptasi yang cepat terhadap perubahan dinamika kesehatan.

Akhirnya, dokumen ini diharapkan tidak hanya menjadi panduan operasional, tetapi juga menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran Dinas Kesehatan dan mitra terkait untuk terus berinovasi, berkontribusi, dan bersinergi dalam mewujudkan masyarakat Balikpapan yang sehat, mandiri, dan berkeadilan.

## C. DINAS PEKERJAAN UMUM

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dan rencana tindak dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 di bidang urusan Pekerjaan Umum. Perangkat dokumen ini berisi visi, misi serta arah pembangunan pemenuhan kebutuhan infrastruktur di bidang Pekerjaan Umum untuk jangka waktu lima tahun kedepan dan menjadi acuan serta pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan.

Disamping mengacu kepada arahan dan kebijaksanaan yang terdapat dalam RPJMD Kota Balikpapan, Renstra Dinas Pekerjaan Umum ini juga mempedomani Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur. Hal ini dilakukan agar dapat mesinkronkan kebijaksanaan desentralisasi dan tugas pembantuan yang terkait dengan urusan Pekerjaan Umum di Kota Balikpapan. Arahan dan kebijaksanaan dimaksud, disesuaikan dengan kondisi infrastruktur yang ada, kapasitas kinerja Dinas yang tersedia, serta prakiraan kemampuan investasi pemerintah dan masyarakat di bidang Pekerjaan Umum, selanjutnya disesuaikan dengan target dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029. Wujud dari Renstra dimaksud akan berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum Renstra, gambaran umum pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Isu-isu strategis, visi, misi, sasaran dan strategi kebijaksanaan pembangunan, serta program, kegiatan dan indikator kinerja yang ditetapkan.

Dalam rangkaian penyusunan Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, tahapan yang dilakukan meliputi telaahan arahan identifikasi data dan fakta terhadap ruang kota, kondisi infrastruktur daerah yang dilanjutkan dengan proses analisis terhadap variabel potensi kinerja dan faktor-faktor eksternalitas Dinas Pekerjaan Umum, arahan RPJMD, Renstra Kementerian dan Renstra urusan pekerjaan Umum Propinsi, sehingga didapatkan daftar kebutuhan prioritas pembangunan bidang Pekerjaan Umum secara menyeluruh. Rangkaian proses kompilasi dan analisis data dimaksud, diharapkan dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap penentuan arah dan kebijakan strategis dan konstruktif untuk pelaksanaan program pemenuhan sarana dan prasarana publik secara simultan selama periode Renstra tahun 2025 - 2029. Dengan demikian, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan juga merupakan perencanaan yang bersifat implementatif (action plan) dan memiliki hubungan yang sinergis dengan kebijakan program Pemerintah Daerah Kota Balikpapan sehingga dapat dijadikan pedoman untuk kegiatan pembangunan dimasa yang akan datang.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Balikpapan 2025-2029 dimana arah pembangunan Kota

Balikpapan berdasarkan Visi Walikota Terpilih adalah ***“Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman”***

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan umum Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005 – 2025;
6. Undang – Undang RI Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
20. Peraturan Menteri Dalam Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
  23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
  24. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan Tahun 2005-2025.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan adalah untuk menjabarkan kebijaksanaan pembangunan daerah dibidang ke PU-an yang terdapat pada RPJMD tahun 2025 - 2029, sebagai salah satu sektor pendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan agar dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Tahunan yang berorientasi pada program dan kegiatan. Secara rinci maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sebagai penjabaran lebih rinci dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029
2. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah tentang upaya-upaya Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dalam peningkatan infrastruktur selama kurun waktu lima tahun kedepan.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif) dalam mengalokasikan anggaran pembangunan di bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.
4. Sebagai pedoman bagi seluruh aparat dan jajaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan infrastruktur daerah.
5. Sebagai pedoman untuk memantapkan peran Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan guna menyusun rencana kinerja tahunan dan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur daerah.
6. Sebagai acuan dalam meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor serta kemitraan dengan stakeholders pembangunan infrastruktur di Kota Balikpapan.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan proses pembangunan sektor Pekerjaan Umum dalam lima tahun kedepan. Program pembangunan dalam jangka waktu lima tahun ini sebagai bagian dari program pembangunan jangka panjang, sehingga dapat diperhatikan keterkaitan antar ruang, waktu dan anggaran.
2. Memberi masukan bagi masyarakat dalam menyusun daftar usulan pembangunan melalui forum Musrenbang.

- 3. Memberikan pedoman dalam menetapkan kebijakan operasional bagi Dinas Pekerjaan Umum untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan urusannya dan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis.
- 4. Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan program dan kebijakan pada Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara utuh dan menyeluruh.
- 5. Terwujudnya kondisi kawasan permukiman yang berkualitas melalui penataan bangunan dan lingkungan, system pelayanan air minum, sanitasi dan drainase.
- 6. Terwujudnya prasarana jalan yang merata, andal dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan mobilitas/pergerakan orang dan barang yang bermuara pada peningkatan derajat perekonomian masyarakat di Kota Balikpapan.
- 7. Terwujudnya pengelolaan dan pengendalian sumber daya air yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.

**1.4. Sistematika Penyusunan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penyusunan
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM</b>
	2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan
	2.5 Permasalahan Perangkat Daerah
	2.6 Isu Strategis Perangkat Daerah
	2.7 Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEKERJAAN UMUM</b>
	3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPU Tahun 2025-2029
	3.2 Penahapan Renstra DPU Tahun 2025-2029
	3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra DPU Tahun 2025-2029
<b>BAB IV</b>	<b>PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>
	4.1 Uraian Program
	4.2 Uraian Kegiatan
	4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif



- 4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama ( IKU) Perangkat Daerah
- 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

## **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD**

#### **2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah baik berupa azas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, yang pelaksanaannya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebagai perwujudan visi dan misi Pemerintah Kota, tentu saja dalam pencapaian kinerja harus terukur dan dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban sebagai bahan evaluasi selanjutnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

##### **2.1.1 Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan**

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 34 Tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang sumber daya air dan drainase, jalan dan jembatan, bangunan gedung pemerintah, penyehatan lingkungan permukiman dan tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **2.1.2. Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan**

Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum;
2. penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pekerjaan umum;
3. pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, perbaikan dan pemantauan di bidang pekerjaan umum;
4. pelaksanaan analisis kelayakan sarana prasarana dan pengelolaan data infrastruktur di bidang pekerjaan umum;
5. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang pekerjaan umum;
6. penyelenggaraan pemberian saran teknis dan/atau layanan rekomendasi/perizinan bidang pekerjaan umum;
7. pembinaan teknis bidang pekerjaan umum;
8. pemberian saran teknis, rekomendasi teknis untuk proses penerbitan perizinan dan non perizinan bidang pekerjaan umum;
9. pengendalian, pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan bidang pekerjaan umum;
10. pembinaan dan pengendalian UPT; dan

11. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan**

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, yang membawahkan:
  - a) Subbagian Program;
  - b) Subbagian Keuangan; dan
  - c) Subbagian Umum.
3. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, yang membawahkan:
  - a) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air dan Drainase;
  - b) Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Drainase; dan
  - c) Seksi Perencanaan dan Pengawasan Sumber Daya Air dan Drainase.
4. Bidang Jalan dan Jembatan, yang membawahkan:
  - a) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
  - b) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
  - c) Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan.
5. Bidang Gedung Pemerintah, yang membawahkan:
  - a) Seksi Pembangunan Gedung;
  - b) Seksi Pemeliharaan Gedung; dan
  - c) Seksi Perencanaan dan Pengawasan Gedung Pemerintah.
6. Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman, yang membawahkan:
  - a) Seksi Pembangunan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
  - b) Seksi Pemeliharaan Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
  - c) Seksi Perencanaan dan Pengawasan Penyehatan Lingkungan Permukiman.
7. UPT; dan
8. Kelompok jabatan fungsional.

### **2.1.4. Tugas, Fungsi Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum**

Tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan ditetapkan melalui Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 34 tahun 2016 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan. Secara rinci, tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang pada Dinas Pekerjaan umum adalah sebagai berikut :

#### **1. SEKRETARIAT**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian:

- a) penyusunan program;
- b) pengelolaan urusan keuangan;
- c) kepegawaian;
- d) rumah tangga kantor;
- e) perlengkapan;
- f) protokol;
- g) hubungan masyarakat;
- h) layanan informasi dan pengaduan;
- i) pembinaan pelayanan publik;
- j) kearsipan;
- k) surat menyurat; dan
- l) evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a) pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b) pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- c) pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- d) pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e) pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- f) pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g) pengelolaan anggaran Dinas dan penerimaan Dinas;
- h) pelaksanaan administrasi keuangan;
- i) pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j) pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- k) pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- l) pengelolaan pengaduan masyarakat;
- m) pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- n) pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
- o) pengoordinasian bidang dan UPT;
- p) pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE**

Bidang Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Sumber Daya Air dan Drainase serta menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan kebijakan teknis dan rencana program kerja bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
- b) penyusunan rencana induk sarana dan prasarana Drainase;
- c) peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggaraan Sumber Daya Air dan Drainase;
- d) pelaksanaan pemberian layanan rekomendasi teknis pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran Drainase;
- e) penyelenggaraan pemeliharaan dan peningkatan sistem Sumber Daya Air dan Drainase;
- f) pengelolaan Sumber Daya Air;
- g) penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat pada sumber air yang menjadi kewenangan Daerah;
- h) penyelenggaraan pemantauan, pemeliharaan dan rehabilitasi sungai, danau, waduk, dan pantai pada wilayah Daerah;
- i) penyusunan dan pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air dalam wilayah Daerah;
- j) pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada irigasi Daerah;

- k) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan inventarisasi sarana prasarana Sumber Daya Air dan Drainase;
- l) pelaksanaan survei dan pengkajian pengembangan jaringan irigasi dan Drainase;
- m) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama/kemitraan antara pemerintah Daerah/dunia usaha/masyarakat untuk penanganan Sumber Daya Air dan Drainase;
- n) pembinaan peningkatan partisipasi pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Sumber Daya Air dan Drainase;
- o) pelaksanaan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi Sumber Daya Air dan Drainase;
- p) pengendalian rekomendasi pemanfaatan ruang manfaatsaluran Drainase dan saluran irigasi;
- q) pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- r) r. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. BIDANG JALAN DAN JEMBATAN**

Bidang Bina Marga mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Jalan dan Jembatan, dan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan rencana kerja Bidang Jalan dan Jembatan;
- b. penyusunan rencana induk sarana, prasarana Jalan dan Jembatan;
- c. peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
- d. pelaksanaan pemberian layanan rekomendasi/saran teknis pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau Jalan dan Jembatan;
- e. penyelenggaraan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- f. penyusunan dan pengelolaan sistem informasi Jalan dan Jembatan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan inventarisasi sarana prasarana Jalan dan Jembatan;
- h. pelaksanaan survei dan pengkajian pengembangan jaringan Jalan dan Jembatan;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama/kemitraan antara pemerintah Daerah/dunia usaha/masyarakat untuk penanganan Jalan dan Jembatan;
- j. pembinaan peningkatan partisipasi pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- k. pelaksanaan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi Jalan dan Jembatan;
- l. pengendalian rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang manfaat milik jalan, ruang pengawasan jalan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

- n. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. BIDANG GEDUNG PEMERINTAH**

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang Gedung Pemerintah melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian di bidang jalan dan jembatan dan mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Gedung Pemerintah;
- b) peningkatan kapasitas teknis dan manajemen penyelenggaraan bangunan gedung milik pemerintah Daerah;
- c) pelaksanaan pemberian layanan verifikasi, rekomendasi atau saran teknis pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan;
- d) penyelenggaraan pembangunan dan perawatan/pemeliharaan bangunan gedung milik pemerintah Daerah;
- e) penyusunan dan pengelolaan sistem informasi bangunan gedung milik pemerintah Daerah;
- f) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan inventarisasi sarana prasarana bangunan gedung milik pemerintah Daerah;
- g) pelaksanaan survei dan pengkajian pengembangan bangunan gedung milik pemerintah Daerah;
- h) pembinaan peningkatan partisipasi pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan gedung milik pemerintah Daerah;
- i) pelaksanaan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi bangunan gedung;
- j) pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- k) k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

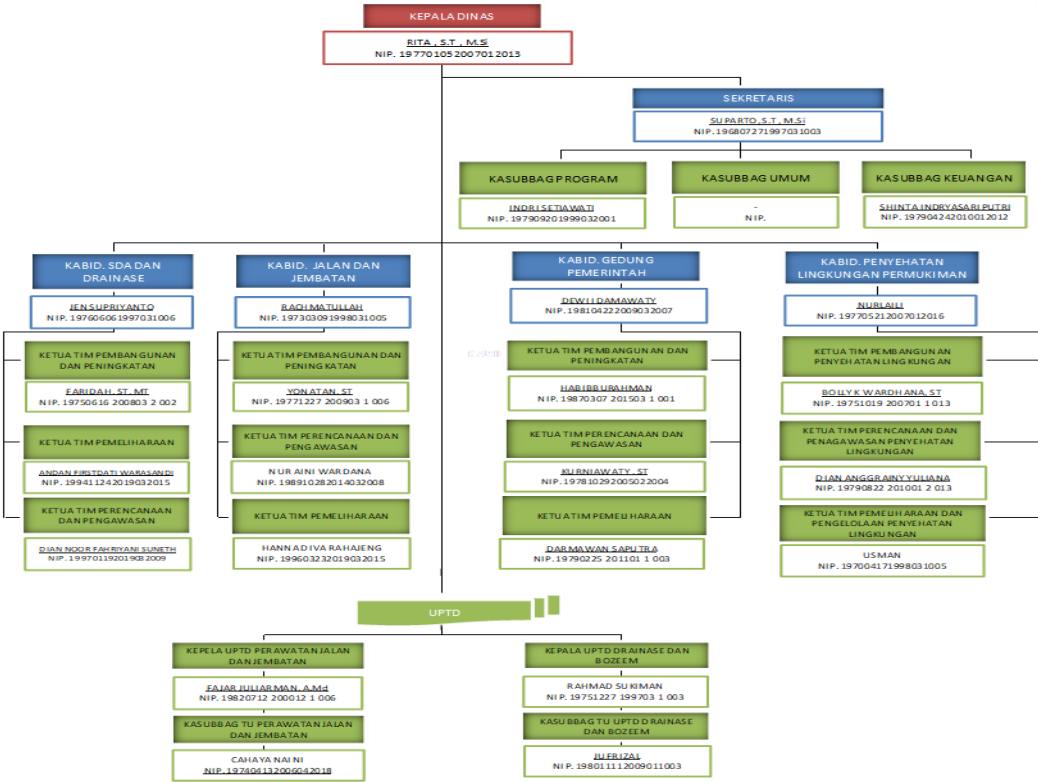
#### **5. BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN**

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman yang meliputi:

- a) jalan penghubung lingkungan;
- b) drainase penghubung lingkungan;
- c) sistem pengelolaan persampahan;
- d) sistem pengelolaan air limbah: dan
- e) sistem penyediaan air minum
- f) Dalam melaksanakan tugas Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi :
- g) penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman
- h) penyusunan rencana induk sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman;
- i) peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggaraan penyehatan lingkungan permukiman;

- j) penyelenggaraan pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan penyehatan lingkungan permukiman;
- k) pelaksanaan perencanaan teknis pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan penyehatan lingkungan permukiman;
- l) pemantauan kondisi lingkungan permukiman;
- m) penyusunan dan pengelolaan sistem informasi penyehatan lingkungan permukiman;
- n) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan inventarisasi sarana prasarana penyehatan lingkungan permukiman;
- o) pelaksanaan survei dan pengkajian pengembangan penyehatan lingkungan permukiman;
- p) pembinaan peningkatan partisipasi pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan penyehatan lingkungan permukiman;
- q) pengembangan sistem dan pengelolaan serta penataan tempat pemrosesan akhir dan tempat penampungan sementara dalam Daerah;
- r) pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan administrasi pembiayaan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan di bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman;
- s) pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- t) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1  
STRUKTUR DINAS PEKERJAAN UMUM (belum Update)



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka menunjang tercapainya tujuan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, perlu disusun rencana pengembangan sumber daya di lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan. Sumber daya yang di butuhkan meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Sarana dan Prasarana yang berupa asset / modal.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui kegiatan bimbingan teknis, workshop, pelatihan/kursus baik gelar maupun non gelar.
- b. Menganalisis kebutuhan personil melalui tingkat pendidikan dan keahlian.

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana (Asset/Modal) :

- a. Merancang kebutuhan prasarana kantor dengan jumlah aparatur.
- b. Merancang analisis kebutuhan sarana bagi aparat perencana.
- c. Merancang kebutuhan sarana dan prasarana alat untuk kegiatan pemeliharaan gedung-gedung pemerintahan, jalan, jembatan dan drainase, termasuk di dalamnya dengan mengembangkan Sumber Daya Teknologi Informasi, diantaranya :
  - i. Merancang kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi.
  - ii. Meningkatkan prasarana bagi penyediaan teknologi informasi.
  - iii. Merancang kebutuhan system infomasi untuk mendukung kebutuhan data perencanaan yang terpadu.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam menyelenggaran tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan per Desember 2024 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 331 orang yang terdiri dari 56 orang pejabat struktural, 60 orang pegawai non struktural, dan 243 pegawai non PNS. Rekapitulasi pegawai (Struktural, Non struktural, CPNS dan Non PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan disajikan pada tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel 2.2.1  
Rekapitulasi Pejabat Struktural dan PNS Non Struktural  
Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Struktural/ Non Struktural	Tingkat Pendidikan	Jumlah
STRUKTURAL	S2	6
	S1	17
	D3	3
	SMA	0
	JUMLAH	27
NON STRUKTURAL	S2	0
	S1	2
	D3	1
	SMA	21



	SLTP	1
	SD	4
	<b>JUMLAH PNS</b>	<b>29</b>
	CPNS	-
	S1	-
	D3	-
	<b>JUMLAH CPNS</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>56</b>

Secara khusus rekapitulasi pegawai (PNS) dan tenaga kontrak di Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2021 di sajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.2.2**  
**Rekapitulasi PNS dan Non PNS Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan**

Jabatan		Pendidikan							Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Tdk ada Pendidikan	
	<b>PNS</b>								
1	Kepala Dinas	1	0	0	0	0	0	0	1
2	Sekretaris	1	0	0	0	0	0	0	1
3	Kepala Bidang	2	2	0	0	0	0	0	4
4	Kepala Seksi	1	10	0	1	0	0	0	12
5	Kasubag	0	1	1	0	0	0	0	2
6	Ka. UPT	0	0	2	0	0	0	0	2
5	Kasubag TU UPT	0	2	0	0	0	0	0	2
6	Pelaksana	0	5	1	21	1	4	0	32
	<b>Jumlah PNS</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
	<b>NON PNS</b>								
1	Honda	0	0	0	0	0	0	0	0
2	THL Pemkot	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PPPK Paruh Waktu	0	0	0	2	3	5	5	17
	<b>Jumlah Non PNS</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>86</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	<b>189</b>

	<b>Jumlah Pegawai DPU</b>	<b>7</b>	<b>39</b>	<b>12</b>	<b>110</b>	<b>26</b>	<b>38</b>	<b>24</b>	<b>254</b>
--	-----------------------------------	----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------------

Sumber : DUK Pegawai DPU Kota Balikpapan Tahun 2021

Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna mendukung tugas-tugas dibidang, Administrasi perkantoran, Keuangan, Pembangunan Jalan dan Jembatan, Sarana dan Prasarana Gedung, Drainase, Bendali, dan Irigasi, yang kedepan semakin banyak tantangan, maka beberapa pegawai telah diikutsertakan dalam berbagai diklat, baik Struktural, maupun bimbingan teknis (Bimtek) atau pelatihan yakni :

a. Diklat Struktural

Sepanjang tahun 2021, pegawai Dinas Pekerjaan Umum yang mengikuti diklat Struktural adalah sebagai berikut :

- Diklat prajabatan yang diikuti oleh Calon Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan.
- Diklat Kepemimpinan Tk.IV yang diikuti oleh Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Drinase

b. Bimtek/Diklat/Pelatihan

Untuk Tahun 2016- 2021 Bimtek dan Diklat yang diikuti oleh Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan baik yang teknis maupun non teknis adalah sebagai berikut :

- Diklat Dasar Pengukuran dan Pemetaan Kadastral di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan
- Diklat Penilaian Aset Tetap Untuk Penyusunan Neraca Pemerintahan
- Diklat Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan
- Diklat Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara
- Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Aset Milik Daerah
- Diklat Sistem Drainase untuk Jalan
- Bimbingan Teknis Estimator Jalan
- Bimbingan Teknis Perpres No.70 Tahun 2012
- Bimbingan Teknis Perencanaan Tenaga Kerja Sektoral
- Diklat Pengembangan Tim Yang Efektif (ESQ)
- Bimbingan Teknis Pelatihan keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- Bimbingan Teknis Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
- Bimbingan Teknis Tenaga Kerja Sektoral
- Bimbingan Teknis Pembangunan SPBG CNG
- Bimbingan Teknis Laik Fungsi Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota
- Diklat Pemeriksaan Jalan dan Jembatan
- Diklat Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Dan lain-lain

2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan dinas, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat

dimanfaatkan secara optimal. Daftar sarana dan prasarana dapat dilihat dalam tabel 2.4 berikut :

**Tabel 2.2.3**  
**Daftar Sarana dan Prasarana DPU Kota Balikpapan**

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1.	Tanah	3.750	m <sup>2</sup>
2.	Bangunan Tempat Kerja	1.016	m <sup>2</sup>
3.	Kendaraan Roda 2	18	unit
4.	Kendaraan Roda 4	19	unit
5.	Kendaraan Roda 6	12	unit
6.	Alat Berat	23	unit
7.	Air Conditioner	2	unit
8.	Penghancur Kertas	2	unit
9.	CCTV	1	paket
10.	Dispenser	6	unit
11.	Filling Kabinet	5	unit
12.	GPS	1	unit
13.	Handy Talky	11	unit
14.	Komputer	54	unit
15.	Printer	45	unit
16.	Laptop	20	unit
17.	Kursi Kerja Staf	82	unit
18.	Meja Kerja Staf	44	unit
19.	Kursi Kerja Pimpinan	6	unit
20.	Meja Kerja Pimpinan	6	unit
21.	Televisi	2	unit
22.	Brankas	1	unit
23.	Kursi Tamu	4	unit
24.	Kursi Rapat (Dome)	2263	unit
25.	Lemari	37	unit
26.	LCD Infocus	2	unit
27.	Meja Resepsionis	1	unit
28.	Sound System	2	unit
29.	Rak Kayu	10	unit
30.	Mesin Absensi	2	unit
31.	Genset	1	unit
32.	Hammer Test	1	unit

Sumber : Simda BMD tahun 2023

**2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan**

**2.3.1. Kinerja Bidang Bina Marga**

Luas Kota Balikpapan seluas 503,33 km2 dengan luas kawasan hutan lindung seluas 147,81 km2, sehingga luas kawasan yang dapat dioptimalkan sebagai kawasan perkotaan adalah seluas 355,49 km2. Salah satu dimensi aksesibilitas perkotaan yang penting adalah hubungan yang

terbentuk antara lokasi kegiatan melalui penyediaan jaringan jalan yang ada. Salah satu variabel yang dapat dinyatakan apakah tingkat aksesibilitas itu tinggi atau rendah dapat dilihat dari banyaknya sistem jaringan yang tersedia pada daerah tersebut. Selain ketersediaan jaringan jalan, aksesibilitas juga dipengaruhi kualitas jalan yang tersedia. Oleh karena itu indeks aksesibilitas perkotaan dapat dihitung berdasarkan panjang jaringan jalan per luas kawasan perkotaan yang dalam hal ini dengan mempertimbangkan kewenangan Pemerintah Kota yaitu pada jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat kota dengan pusat kegiatan lingkungan.

**Tabel 2.5**  
**Panjang Jalan Kota Menurut Keadaan (dalam Km), Tahun 2019-2023**

Kualitas	2019		2020		2021		2022		2023	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Baik	95,39	19,04	365,31	72,89	344,95	68,83	322,279	62,14	137,584	31,07
Sedang	295,56	58,97	96,59	19,27	102,36	20,42	169,129	32,61	218,351	49,31
Rusak	58,6	11,69	38,91	7,76	53,87	10,75	27,24	5,25	24,297	5,49
Rusak Berat	51,63	10,3	0,38	0,08	0	0	0	0	62,561	14,13
Jumlah	501,18	100	501,18	100	501,18	100	518,648	100	442,793	100

Sumber : BPS Kota Balikpapan, 2024

**2.3.2. Kinerja Bidang Pengairan**

Secara morfologis Kota Balikpapan terdiri dari kawasan perbukitan yang bergelombang +/-85% dan +/-15% merupakan daerah dataran yang terletak di sepanjang pantai timur dan selatan wilayah Kota Balikpapan yang berpotensi terhadap banjir. Dengan kondisi yang berbukit-bukit maka diperlukan pengelolaan drainase yang cukup baik di Kota Balikpapan. Pada tahun 2024 titik banjir di Kota Balikpapan adalah sebanyak 64.

Upaya pengelolaan drainase di Kota Balikpapan selama ini mengacu pada Masterplan Drainase Kota Balikpapan yang telah mengatur mengenai rencana dimensi drainase dan rencana pembangunan bendungan pengendali (bendali) banjir di beberapa titik. Selain karena tidak mempunya drainase yang ada untuk menampung debit banjir yang terjadi akibat tingginya sedimentasi karena pengupasan lahan, banjir di Kota Balikpapan juga diakibatkan oleh banyaknya saluran drainase yang masih belum optimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 14 /PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Daerah Irigasi Yang Menjadi Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota di Kota Balikpapan terdapat 2 (dua) daerah irigasi yaitu daerah irigasi Balikpapan Utara seluas 25 Ha dan daerah irigasi Gunung Binjai seluas 325 Ha. Khusus daerah irigasi Gunung Binjai memiliki luas area tanam seluas 150 Ha dengan indeks pertanaman 100% serta produksi 3,5 ton/Ha/panen.

**2.3.3. Kinerja Bidang Cipta Karya**

Total Gedung Pemerintah Kota Balikpapan adalah sebanyak 62 gedung dari 66 instansi. Hal ini karena sejak dilakukannya konsep gedung

gabungan dinas yaitu beberapa instansi berada dalam 1 bangunan gedung yaitu antara lain gedung gabungan dinas Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial. Selain itu, juga terdapat gedung gabungan dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dari 62 gedung tersebut terdapat 82,26% yang layak sedangkan 17,74% lainnya dengan kondisi yang tidak layak yang dikarenakan kondisi bangunan atau status sewa. Adapun rincian kondisi gedung kantor Pemerintah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3.3**  
**Kondisi Bangunan Gedung Kantor**  
**Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025**

NO	INSTANSI	STATUS	KONDISI BANGUNAN
1	Dinas Pendidikan	Milik Sendiri	Layak
2	Dinas Kesehatan Kota	Milik Sendiri	Layak
3	Dinas Pekerjaan Umum	Milik Sendiri	Layak
4	Dinas Tata Kota dan Perumahan	Milik Sendiri	Layak
5	Dinas Perhubungan	Milik Sendiri (Gabung)	Layak
6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil & Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB)	Milik Sendiri (Gabung)	Layak
7	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Dinas Pendapatan Daerah & Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	Milik Sendiri (Gabung)	Layak
8	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	Milik Sendiri	Layak
9	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	Milik Sendiri	Layak
10	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman & Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Milik Sendiri (Gabung)	Tidak Layak
11	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan	Milik Sendiri	Tidak Layak (dalam proses pembangunan)
12	Dinas Pasar	Milik Sendiri	Layak
13	Inspektorat	Milik Sendiri	Layak

NO	INSTANSI	STATUS	KONDISI BANGUNAN
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	Milik Sendiri	Layak
15	Badan Lingkungan Hidup (BLH)	Milik Sendiri	Layak
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	Milik Sendiri	Layak
17	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pindtu (DPMPTSP)	Milik Sendiri	Layak
18	Kantor Arsip dan Perpustakaan	Milik Sendiri	Layak
19	Kantor Kesbang dan Politik	Milik Sendiri	Layak
20	Satuan Polisi Pamong Praja	Milik Sendiri	Tidak Layak
21	Rumah Sakit Umum Daerah	Milik Sendiri	Layak
22	Gedung DPRD	Milik Sendiri	Tidak Layak (dalam proses pembangunan)
23	Kecamatan Balikpapan Timur	Milik Sendiri	Layak
24	Kecamatan Balikpapan Barat	Milik Sendiri	Layak
25	Kecamatan Balikpapan Tengah	Sewa	Tidak Layak
26	Kecamatan Balikpapan Utara	Milik Sendiri	Layak
27	Kecamatan Balikpapan Kota	Milik Sendiri	Layak
28	Kecamatan Balikpapan Selatan	Milik Sendiri	Layak
29	Kelurahan Teritip	Milik Sendiri	Layak
30	Kelurahan Manggar	Milik Sendiri	Layak
31	Kelurahan Lamaru	Milik Sendiri	Layak
32	Kelurahan Manggar Baru	Milik Sendiri	Layak
33	Kelurahan Kariangau	Milik Sendiri	Layak
34	Kelurahan Margomulyo	Milik Sendiri	Layak
35	Kelurahan Baru Ilir	Milik Sendiri	Layak
36	Kelurahan Baru Ulu	Milik Sendiri	Layak
37	Kelurahan Baru Tengah	Milik Sendiri	Layak
38	Kelurahan Margasari	Milik Sendiri	Layak
39	Kelurahan Sumber Rejo	Milik Sendiri	Layak
40	Kelurahan Gunung Sari Ilir	Milik Sendiri	Layak
41	Kelurahan Gunung Sari Ulu	Milik Sendiri	Layak
42	Kelurahan Karang Jati	Milik Sendiri	Layak
43	Kelurahan Mekar Sari	Sewa	Tidak Layak
44	Kelurahan Karang Joang	Sewa	Tidak Layak
45	Kelurahan Gunung Samarinda	Milik Sendiri	Layak

NO	INSTANSI	STATUS	KONDISI BANGUNAN
46	Kelurahan Gunung Samarinda Baru	Milik Sendiri	Layak
47	Kelurahan Batu Ampar	Milik Sendiri	Layak
48	Kelurahan Graha Indah	Milik Sendiri	Layak
49	Kelurahan Muara Rapak	Milik Sendiri	Layak
50	Kelurahan Damai Baru	Milik Sendiri	Layak
51	Kelurahan Damai Bahagia	Milik Sendiri	Tidak Layak
52	Kelurahan Gunung Bahagia	Milik Sendiri	Layak
53	Kelurahan Sungai Nangka	Milik Sendiri	Layak
54	Kelurahan Sepinggian	Milik Sendiri	Layak
55	Kelurahan Sepinggian Raya	Milik Sendiri	Layak
56	Kelurahan Sepinggian Baru	Milik Sendiri	Layak
57	Kelurahan Prapatan	Milik Sendiri	Layak
58	Kelurahan Telaga Sari	Milik Sendiri	Layak
59	Kelurahan Klandasan Ulu	Milik Sendiri	Tidak Layak
60	Kelurahan Klandasan Ilir	Milik Sendiri	Tidak Layak
61	Kelurahan Damai	Milik Sendiri	Layak
62	Kelurahan Karang Rejo	Milik Sendiri	Layak
KETERANGAN :			
1	Total Instansi / SKPD	= 67 Instansi	
2	Total Gedung Pemerintah	= 62 Gedung	
3	Jumlah gedung Pemerintah yang Layak	= 51 Gedung	82,26%
4	Jumlah Gedung Pemerintah yang Tidak Layak	= 11 Gedung	17,74%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025

### 2.3.4. Kinerja Bidang Penyehatan Lingkungan Perumahan

Salah satu permasalahan dalam penyediaan air minum di Kota Balikpapan adalah mengenai ketersediaan air baku. Sumber air baku saat ini terdiri air permukaan yang sebagian besar disediakan oleh Waduk Manggar. Kekurangan sumber air baku yang diproyeksikan sebesar 572 liter/detik pada tahun 2021. Berdasarkan Rencana Induk Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kota Balikpapan Tahun 2015, kebutuhan air baku di Kota Balikpapan pada tahun 2021 mencapai 2.097 liter/detik. Dalam rangka memenuhi kebutuhan air baku, saat ini Kota Balikpapan telah menyelesaikan pembangunan Waduk Teritip dengan kapasitas 250 liter/detik. Pada tahun 2019 akan dimulai pembangunan Embung Aji Raden dengan kapasitas 150 liter/detik yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Balai Wilayah Sungai Kalimantan III) serta proses pelelangan pembangunan sistem Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) dengan kapasitas 50 liter/detik yang dilaksanakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Beberapa sumber air baku yang dikelola oleh Swasta, salah satunya yaitu IPA dari Sungai Wain yang dikelola oleh Pertamina. IPA yang dibangun oleh Pertamina ini untuk keperluan internal baik untuk keperluan produksi dan untuk pelayanan perumahan karyawan

Pertamina Water Treatment Plan (WTP) Pertamina yang melayani Unit Produksi Pertamina RU V dan melayani perumahan karyawan Pertamina. Selain itu ada juga perusahaan PT. DKI yang menggunakan air laut sebagai sumber air baku air bersih. Penyediaan air ini untuk keperluan internal baik untuk keperluan produksi dan untuk pelayanan perumahan karyawan. Kawasan perumahan swasta di Kota Balikpapan salah satu persyaratannya harus menyediakan air bersih untuk memenuhi kawasan perumahannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut sebagian besar perumahan mengajukan ijin pembuatan sumur dalam yang juga dilengkapi dengan WTP. Adapun sumber air baku lainnya berasal dari sungai-sungai kecil dan beberapa sumur yang tersebar di beberapa lokasi sebagai berikut:

**Tabel 2.3.4**  
**Sumber Air Baku Kota Balikpapan**

LAPORAN JUMLAH PENGAMBILAN AIR TANAH DALAM (ATD) SELURUH INSTALASI PENGOLAHAN AIR Maret 2022								
STALASI PENGOLAHAN AIR (IPA)	LOKASI SMR	TAHUN DIBUAT	KAPASITAS			Jam Operasi	KONDISI SMR	KETERANGAN
			M3/BULAN	M3/JAM	L/Dt			
IPA KAMPUNG DAMAI	IDEM	IDEM	101.674	162,0	45,01		IDEM	
IPA GUNUNG SARI	IDEM	IDEM	325.385	504,4	140,11		IDEM	
IPA PRAPATAN	IDEM	IDEM	113.899	252,5	70,13		IDEM	
IPA ZAMP	IDEM	IDEM	23.525	36,3	10,08		IDEM	
IPA KP BARU ULU	IDEM	IDEM	45.531	67,8	18,82		IDEM	
JUMLAH PENGAMBILAN AIR TANAH DALAM SELURUH IPA			610.014	1022,97	284,16			

LAPORAN JUMLAH PENGAMBILAN AIR PERMUKAAN (AP) SELURUH INSTALASI PENGOLAHAN AIR Maret 2022								
STALASI PENGOLAHAN AIR (IPA)	LOKASI IPA / SUMBER	TAHUN DIBUAT	KAPASITAS			Jam Operasi	KONDISI IPA	KETERANGAN
			M3/BULAN	M3/JAM	L/Dt			
IPA TERITIP	WADUK TERITIP	IDEM	397.822	600,94	166,93	662	BAIK	TOTAL PRODUKSI
IPA KAMPUNG DAMAI	WDK. KM.12	IDEM	1.129.601	1771,92	492,20	638	BAIK	AIR TANAH DALAM & AIR PERMUKAAN (M3)
IPA BATU AMPAR	WDK. KM.12	IDEM	1.182.332	1817,57	504,88	651	BAIK	3.471.065
IPA KM 12	WDK. KM.12	IDEM	151.296	229,58	63,77	659	BAIK	
JUMLAH PENGAMBILAN AIR PERMUKAAN			2.861.051	4420,02	1227,78			

Adapun untuk ketersediaan air minum, Kota Balikpapan memiliki permasalahannya sendiri. Cakupan layanan air minum pada tahun 2020 realisasinya sebesar 79,6%. Realisasi ini masih berada di bawah capaian nasional yang sudah mencapai 100%. Selain itu indikator cakupan layanan air minum ini terkait dengan SDGs pada tujuan keenam sasaran satu. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang SPM PU&Pera, kebutuhan pokok minimal air minum sejumlah 60 liter/orang/hari. Definisi air minum yang dimaksud dalam hal ini adalah air yang digunakan untuk aktivitas rumah tangga seperti minum, masak, cuci, mandi, dan lain-lain. Adapun jumlah penduduk mencapai 667.188 pada tahun 2019, kapasitas produksi masih belum ideal yaitu 1.305 liter/detik. Hal inilah yang mengakibatkan cakupan persentase pelayanan juga masih belum optimal. Tingkat kehilangan air juga masih cukup tinggi sekitar 31,55%. Persentase ini hampir sama dengan membuat 1 SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) baru. Adapun layanan air minum perpipaan non PDAM dan air minum non perpipaan masing-masing mencapai 11%. Sebagian besar air minum perpipaan non PDAM dilaksanakan oleh perumahan formal dan perumahan karyawan sektor Minyak dan Gas di Kota Balikpapan. Layanan air minum non perpipaan adalah air minum yang disediakan tanpa menggunakan jaringan pipa air minum baik yang bersumber dari air permukaan, air tanah/sumur gali dan air hujan. Pengelolaan air minum di Kota Balikpapan yang saat ini sebagian besar dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Balikpapan, dimana hingga bulan November tahun 2020 cakupan pelayanan PDAM Kota



Balikpapan telah mencapai 77.29 %. Adapun perkembangan pelayanan air bersih jaringan perpipaan Kota Balikpapan sebagai berikut

**Tabel 2.3.5**  
**Perkembangan Pelayanan Air Minum Perpipaan Kota Balikpapan**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk (Jiwa)	736.807	762.492	769.919	644.315	667.188	697.079
2	Jumlah pelanggan (SR)	93.279	95.781	98.111	100.199	103.144	108.161
3	Cakupan pelayanan (%)	77,29	76,5	76,56	79,05	79,6	81,37
4	Kapasitas produksi (l/det)	1.189,79	1.147,20	1.215	1.276	1.305	
5	Panjang perpipaan (m)	1.258.464	1.308.767	1.335.998	1.359.110	1.375.944	30,4
6	Persentase Kehilangan Air (%)	29,08	30,46	34,36	33,23	31,55	

Sumber: PDAM Kota Balikpapan Tahun 2020

Sementara itu, untuk pengelolaan air limbah, Kota Balikpapan terus upaya untuk menyediakan fasilitas pembuangan air limbah yang baik dan meningkatkan lingkungan permukiman yang bersih, sehat dan nyaman menuju Universal Access Tahun 2019. Sarana dan prasarana air limbah di Kota Balikpapan terbagi menjadi beberapa sistem yaitu sistem terpusat dan sistem setempat. Fasilitas pengelolaan air limbah terpusat yang ada di Kota Balikpapan adalah IPAL skala kawasan di Kelurahan Margasari yang melayani 2.076 Sambungan Rumah (SR). Hal ini mengalami peningkatan dari 1.308 Sambungan Rumah setelah dilaksanakan pengembangan jaringan yang bersumber dari pendanaan Hibah Air Limbah SAIIG pada tahun 2016-2018. Selain IPAL Kawasan, pengelolaan limbah terpusat juga dilakukan melalui sistem IPAL Komunal dengan jumlah yang terbangun sejak tahun 2006 sampai dengan 2019 sebanyak 53 unit atau 2.603 Sambungan Rumah (SR) dan sumber pendanaan berasal dari Program Sanimas, SLBM maupun DAK Sanitasi yang dilakukan pengelolaan secara swadaya oleh masyarakat. Untuk meningkatkan layanan air limbah di Kota Balikpapan khususnya untuk sistem setempat, Pemerintah Kota Balikpapan telah membangun tangki septik individu sebanyak 450 unit pada tahun 2018 dengan sumber pendanaan berasal dari Hibah Air Limbah Setempat (Sanitasi) APBN TA 2018 dan DAK

**Tabel 2.3.6**

**Sarana Prasarana Pengelolaan Air Limbah Di Kota Balikpapan Tahun 2015-2020**

No	Tahun	Sarana Prasarana Pengelolaan Air Limbah		
		Sambungan Rumah	IPAL Komunal (Unit)	Tangki Septik yang
1	2015	-	3	-
2	2016	500	2	-
3	2017	-	5	-
4	2018	-	10	450
5	2019	-	7	-
6	2020			42
Jumlah		2.076	53	450

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman dan PDAM Kota Balikpapan Tahun 2019

Terkait dengan persampahan, Volume sampah Kota Balikpapan masuk ke TPA Sampah Manggar mengalami kenaikan sebesar 8,8 ton apabila

dibandingkan dengan tahun 2018. Hal tersebut dipengaruhi oleh proyek strategis pertamina yaitu Refinery Development Master Plan (RDMP) tetapi Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan berbagai cara untuk mempertahankan atau menurunkan jumlah sampah yang masuk ke TPA, salah satu cara yang dilakukan yaitu menerbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai.

**Tabel 2.3.7**

**Volume Sampah Ke TPAS Manggar Kota Balikpapan Tahun 2015-2020**

Tahun	Volume Sampah
2015	370,55
2016	358
2017	353,24
2018	348,22
2019	357,1
2020	308,56

Sumber: TPA Manggar Kota Balikpapan 2020

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak sampah ini, pemerintah Kota Balikpapan melakukan beberapa kegiatan seperti optimalisasi peningkatan pelayanan persampahan sebesar 99%. Optimalisasi ini dilakukan untuk mengurangi jumlah produksi sampah khususnya bagi rumah tangga yang selama ini belum mendapatkan layanan pengangkutan sampah. Kegiatan lainnya yang perlu digalakkan adalah pelaksanaan Pilot Project Pemilahan Sampah di sumber, di Kelurahan Gunung Bahagia. Rencana ini diharapkan dalam ditularkan ke beberapa titik-titik potensi di kelurahan, sehingga masifikasi pemilahan sampah dapat dilaksanakan secara optimal. Selanjutnya adalah peningkatan pembentukan bank sampah (salah satunya terdapat bank sampah induk), TPS 3R. sebagaimana yang telah dijelaskan pada tabel sebelumnya, terjadi penurunan jumlah dan kualitas beberapa sarana prasarana persampahan sehingga menghambat upaya pengelolaan sampah secara komprehensif. TPA Manggar juga akan diperluas agar penampungan sampah juga akan semakin meningkat. Pengoperasian Materail Recovery Facility (MRF) dan Intermediate Treatment Fasility (ITF) juga diharapkan dapat membantu percepatan pengelolaan sampah secara terpadu. TPA Manggar adalah fasilitas milik Pemerintah Kota Balikpapan yang berdiri di atas lahan seluas 49,89 hektar di jalan Proklamasi RT. Upaya lainnya setelah mengoptimalkan pengelolaan sampah, pemerintah akan melaksanakan kerjasama dengan PT.Pupuk Indonesia dalam hal pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk organik.

**2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN**

Terkait tugas dan fungsi pokok, Dinas Pekerjaan Umum memiliki beberapa permasalahan yang mendukung dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan Kota Balikpapan. Adapun faktor-faktor yang dapat diperhitungkan mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a) Kekuatan (strength)**

Kondisi dan potensi yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan merupakan faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, faktor-faktor kekuatan tersebut antara lain :

1. Untuk menunjang tugas rutin sehari-hari, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan saat ini memiliki jumlah pegawai 331 orang yang terdiri dari 88 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil), 1 orang Honorer Daerah, 50 Tenaga Harial Lepas (THL) Pemerintah Kota dan 241 Tenaga Bantu/THL Lapangan/Kantor.
2. Pegawai Dinas Pekerjaan Umum sebesar 32,95 % berpendidikan sarjana, hal ini merupakan salah satu pendorong dan modal dasar untuk menciptakan profesionalisme perencana.
3. Tersedianya sarana dan prasarana kerja. Fasilitas ini menyangkut gedung dan ruang kantor, sarana transportasi, peralatan kantor (baik perangkat keras maupun perangkat lunak).
4. Adanya dokumen perencanaan daerah yang hirarkinya sudah jelas yaitu : jangka panjang, menengah dan tahunan

**b) Kelemahan (Weakness)**

Faktor- faktor kelemahan antara lain :

1. Terbatasnya pegawai tetap / PNS yang berlatar pendidikan teknis bidang Pekerjaan Umum untuk mendukung analisa baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dan pengendalian.
2. Belum optimalnya penggunaan sistem informasi manajemen sebagai salah satu perangkat untuk dokumentasi (data base) dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan, hal ini salah satunya diakibatkan keterbatasan sumber daya manusia di bidang informasi dan teknologi.

**c) Peluang (Opportunity)**

Faktor-faktor peluang antara lain :

1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menunjang efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan.
2. Dukungan pimpinan daerah dan masyarakat Kota Balikpapan untuk mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan handal.

**d) Ancaman (Threatness)**

Faktor-faktor ancaman antara lain :

1. Keterbatasan ketersediaan dan alokasi anggaran untuk mewujudkan pekerjaan yang telah direncanakan.
2. Tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur seiring pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah Kota Balikpapan.
3. Peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan pembangunan/pengelolaan infrastruktur.

**TABEL T-C.23****Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024 KOTA BALIKPAPAN**

No	Indikator	SFM/Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA DPU Kota Balikpapan			Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum			83,00	84,00	85	77,71	78,78	98,74	
2	Presentase Meningkatnya Kinerja Sumber Daya Air			55,79	57,48	59,18	54,41%	60,43	81,74	
3	Presentase Infrastruktur Sektor Kesehatan Lingkungan dalam Kondisi Baik			97,85	97,93	98,14	97,96%	97,11	98,14	
4	Presentase Infrastruktur Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik			79,95	81,25	82,55	82,18%	79,92	42,97	
5	Jumlah Bangunan yang Memiliki SLF			45	65	85	68	94	123	
6	Presentase Pelayanan Jasa Konstruksi			29,12	30,72	33,11	28,37%	29,73	32,5	
7	Nilai SAKIP OPD			77	78	79	78,87	69	N/A	
8	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			27,00	28,75	30,5	27	27	N/A	
9	Presentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan			61,76	61,76	64,71	55,88%	67,65	67,65	
10	Presentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota			53,09	53,09	53,46	53,06%	53,47	54,22	
11	Presentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak			97,10	97,1	97,25	97,18%	93,39	96,29	
12	Presentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan			98,54	98,54	98,8	98,54%	99,51	99,7	
13	Presentase Penyediaan Sarana Persampahan			97,82	97,82	98	97,82%	97,96	98	
14	Presentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab			87,36	87,36	89,12	85,36%	80	85,93	
15	Presentase Pelayanan Jalan Lingkungan			76	78,18	79,05	79,00%	79,45	N/A	
16	Presentase Bangunan yang Memiliki Izin			93,39	93,9	93,9	92,80%	92,57	93,59	
17	Presentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi			100	100	100	100%	100	100	
18	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah			82	82	100	82	82	100	



## **2.5 PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.5.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan**

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, analisa isu-isu strategis adalah bagian yang terpenting. Dari hasil analisa isu yang tepatlah, prioritas pembangunan dapat dijalankan dan dipertanggungjawabkan. Isu strategis didapatkan dari analisa internal berupa identifikasi permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, maupun dari analisa eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan juga ancaman di 5 tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini antara lain adalah :

1. Hasil analisis gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan;
2. Hasil telaahan visi, misi dan program Wali Kota Balikpapan 2025-2029;
3. Hasil telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI 2015-2019;
4. Hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Balikpapan.

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Capaian kinerja Dinas PU Kota Balikpapan 5 tahun terakhir ini telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum. Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di

tiap Bidang/UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM ataupun RPJMD Tahun 2025-2029. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

#### **2.5.1.1 Identifikasi Permasalahan pada Sekretariat**

Hasil identifikasi permasalahan pada Sekretariat berdasarkan Tupoksinya, adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.
- b. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat.
- c. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas dan UPTD Dinas belum optimal.
- d. Belum optimalnya data dan informasi Dinas yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### **2.5.1.2 Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Jalan dan Jembatan**

Hasil identifikasi permasalahan pada Bidang Bina Marga berdasarkan Tupoksinya, adalah sebagai berikut :

- a. Indeks aksesibilitas sebesar 1,415 masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pengembangan wilayah perkotaan.
- b. Masih terdapat 18,66 km (3,72%) jalan dalam kondisi rusak yang perlu diperbaiki dengan program peningkatan jalan.
- c. Beberapa ruas jalan di Kota Balikpapan tidak memenuhi SPM pada aspek kecepatan, yang disebabkan oleh kemacetan/kelebihan LHR pada ruas jalan dimaksud.
- d. Pembangunan jalan belum didukung oleh suatu sistem perencanaan dan pemrograman yang akurat karena belum terlaksananya kegiatan updating sistem informasi jalan dan jembatan

#### **2.5.1.3. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Sumber Daya Air dan Drainase**

Hasil identifikasi permasalahan pada Bidang Sumber Daya Air dan Drainase berdasarkan Tupoksinya, adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah titik banjir yang cenderung meningkat akibat kegiatan pembukaan lahan.
- b. Belum terlaksanakannya secara baik integrasi/sinkronisasi pembangunan dengan rencana yang telah disusun pada masterplan drainase Kota Balikpapan.

- c. Belum terselesaikannya pembebasan lahan untuk kegiatan normalisasi sungai dan pelebaran drainase sehingga kegiatan belum terlaksana 100%.
- d. Tingginya biaya operasional dan pemeliharaan jaringan drainase akibat sedimentasi mengingat jenis tanah Kota Balikpapan yang mudah lepas (pasir).
- e. Kekurangan sumber air baku yang diproyeksikan sebesar 400 liter/detik pada tahun 2021.
- f. Pembangunan saluran drainase belum didukung oleh suatu system perencanaan dan pemrograman yang akurat karena belum terlaksananya kegiatan updating system informasi drainase .
- g. Belum adanya pembagian saluran drainase kota dan permukiman melalui SK Walikota yang menjadi tugas Bidang Sumber Daya Air dan Drainase.

#### **2.5.1.4. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Gedung Pemerintah**

Hasil identifikasi permasalahan pada Bidang Gedung Pemerintah berdasarkan Tupoksinya, adalah sebagai berikut :

- a. Masih terdapat 27,42% gedung-gedung pemerintahan yang sudah tidak layak karena kondisi atau status sewa.
- b. Rencana pembentukan organisasi perangkat daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga serta sarana dan prasarana umum yang hingga saat ini masih dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum karena belum ada rencana pemanfaatan dan kelembagaan yang efektif dan efisien.
- d. Belum dikembangkannya penyelenggaraan gedung pemerintah dengan menggunakan sistem informasi.

#### **2.5.1.5. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman**

Hasil identifikasi permasalahan pada Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman berdasarkan Tupoksinya, adalah sebagai berikut :

- a. Cakupan pelayanan air minum perpipaan belum mencapai 100% yaitu sebesar 77,20%.
- b. Cakupan pelayanan air limbah belum mencapai 100% yaitu sebesar 92%.
- c. Kebutuhan penyediaan sarana persampahan berupa pengembangan TPA Manggar, TPST/ITF, dan TPS 3R yang baru dapat dipenuhi sebesar 28%.
- d. Belum adanya data base penyediaan Prasarana & dan Sarana Dasar Kawasan Permukiman, baik pada pelayanan jalan lingkungan, drainase, maupun sanitasi dan air minum.



**Tabel 2.5****Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Penyebab masalah /Akar Masalah</b>
Masih banyak bangunan gedung yang belum memiliki PBG dan SLF	Belum optimalnya pelayanan PBG/SLF	Kesadaran masyarakat dan sosialisasi yang masih kurang
		SDM pelayanan PBG/SLF masih kurang
		Kompetensi konsultan perencana yang masih belum memenuhi standar
	Belum optimalnya pembangunan bangunan gedung pemerintah yang berstandar kesetaraan gender	Bangunan gedung pemerintah eksisting belum berstandar kesetaraan gender
Masih banyak lembaga dan tenaga kerja konstruksi yang belum bersertifikasi / berkompeten	Belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat jasa konstruksi terkait bidang Jasa Konstruksi	Belum terbentuknya bidang Bina Konstruksi yang berfokus pada pembinaan, pelatihan, dan pengawasan tata tertib konstruksi pada pelaku jasa konsturksi
Cakupan pelayanan air minum Jaringan Perpipaan (JP) belum mencapai 100%	Belum optimalnya ketersediaan air baku untuk pelayanan air minum	Masih kurangnya ketersediaan air baku
	Kondisi Eksisting masih tingginya tingkat NRW (Non-Revenue Water)	Masih banyak jaringan perpipaan yang sudah lama dan memerlukan peremajaan
Cakupan pelayanan air minum Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) belum mencapai 100%	Belum optimalnya pengelolaan air bersih terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Masih kurangnya pengelolaan air baku BJP oleh Masyarakat dan/atau Pihak Swasta

Masalah Pokok	Masalah	Penyebab masalah /Akar Masalah
Cakupan pelayanan air limbah belum mencapai 100%	Belum optimalnya sarana dan teknologi pengelolaan air limbah domestik	Masih kurangnya sambungan rumah yang terpasang pengelolaan air limbah (baik setempat maupun terpusat)
		Keterbatasan lahan (dalam hal luas lahan maupun legalitasnya)
		Kurangnya air baku sebagai penunjang untuk aktivitas MCK (Penggelontoran)
	Di beberapa wilayah masih kurang kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Kurangnya sosialisasi untuk mendapatkan akses pelayanan SPALDS dan SPALDT di masyarakat
		Belum adanya regulasi tentang pengelolaan air limbah domestik yang mewajibkan masyarakat mengelola air limbah domestik secara aman
	Terdapat sebagian masyarakat (yang bermukim di permukiman atas air) yang tidak bersedia mendapatkan layanan sambungan rumah	Kurangnya ketersediaan air baku (defisit)
Prasarana persampahan berupa pengembangan TPA Manggar, TPST/ITF, dan TPS 3R belum 100 % terpenuhi	Terdapat sebagian masyarakat (yang bermukim di permukiman atas air) yang tidak bersedia mendapatkan layanan sambungan rumah	Belum tersedianya prasarana persampahan secara menyeluruh di kotoa Balikpapan, Kurangnya penerapan sanksi yang tegas terkait regulasi persampahan yang telah ditetapkan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah dari sumber
Prasarana persampahan berupa pengembangan TPA Manggar, TPST/ITF, dan TPS 3R belum 100 % terpenuhi	Belum optimalnya prasarana infrastruktur persampahan	Kurangnya penerapan sanksi yang tegas terkait regulasi persampahan yang telah ditetapkan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah dari sumber
	terbatasnya area layanan sarana infrastruktur persampahan	Belum tersedianya sarana persampahan secara menyeluruh di kota Balikpapan, Keterbatasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan sarana infrastruktur persampahan
Kemantapan Jalan	menurut database survey kondisi jalan tahun 2024, terdapat 65,706 km (14,07%) jalan dalam kondisi tidak mantap (Rusak Ringan dan Rusak Berat).	Kendaraan <i>Over Dimension Over Load</i> (ODOL) yang masih melintas di jalan kota Balikpapan, banjir dan genangan pada badan jalan, fungsi tali air pada jalan tidak optimal, longsor pada badan jalan.
Kemantapan jembatan	Terdapat 74 jembatan dari 116 total jembatan kota balikpapan dalam kondisi Rusak Ringan (database survey kondisi jembatan tahun 2024).	belum optimalnya program pemeliharaan jembatan.
Penurunan nilai kinerja jalan akibat menurunnya kapasitas jalan	Belum optimalnya pengembangan jaringan jalan baru dan pelebaran jalan. Belum optimalnya pembangunan dan penataan trotoar.	Pembebasan lahan, parkir kendaraan dipinggir jalan membuat peningkatan hambatan samping, trotoar standar yang layak bagi pejalan kaki belum tersedia di seluruh jalan kota balikpapan sehingga pejalan kaki masih menggunakan tepi badan jalan/ bahu jalan untuk aktivitas mobilisasi.

Masalah Pokok	Masalah	Penyebab masalah /Akar Masalah
Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase	Dari total 53 bangunan SDA di Kota Balikpapan hanya 27 bangunan menjadi kewenangan kota, BWS 12 dan developer 14	Urbanisasi dan alih fungsi lahan menyebabkan daerah resapan menjadi permukaan kedap air dan meningkatkan limpasan permukaan (run off) dan beban drainase
		Curah hujan ekstrim dan kenaikan muka air laut sehingga memperburuk drainase dan risiko rob
		Belum tersedianya sistem informasi drainase perkotaan dan permukiman yang terupdate dengan baik
	Dari total luas wilayah Kota Balikpapan hanya 37.798,5 Ha yang terlindungi infrastruktur	Belum terselesaikannya pembebasan lahan untuk kegiatan pelebaran drainase perkotaan, pembangunan pompa banjir dan pembangunan kolam retensi (bendali)
		Pembangunan saluran drainase belum didukung oleh suatu system perencanaan dan pemrograman yang akurat karena belum terlaksananya kegiatan updating system informasi drainase
		Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memelihara drainase yang telah terbangun

## 2.6 ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu strategis merupakan permasalahan pokok yang berkaitan dengan fenomena atau kondisi permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya. Fenomena dalam isu strategis tersebut memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diantisipasi dan diatasi secara bertahap dan berkelanjutan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Dari hasil analisis terhadap isu-isu internal dan eksternal dalam pembangunan Pekerjaan Umum di Kota Balikpapan, perlu diklasifikasikan dan disesuaikan per masing-masing bidang agar permasalahan dan isu strategis dapat ditangani secara terfokus sekaligus dapat berguna bagi pengembangan analisis SWOT berikutnya.

### - **Bidang Jalan dan Jembatan**

- Pemeliharaan dan peningkatan jalan kota dalam rangka meningkatkan kemantapan jalan.
- Kapasitas ruas jalan dan kapasitas simpang yang belum optimal.
- Pembangunan jalan guna mendukung peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berwawasan lingkungan (*green economy*).
- Pengembangan sistem informasi Jalan dan Jembatan

### - **Bidang Sumber Daya Air dan Drainase**

- Penyediaan sumber air baku yang berkelanjutan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.
- Pembangunan dan pengelolaan bendali/bozem masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi titik banjir.
- Pembinaan penyelenggaraan pengendalian banjir melalui pengelolaan drainase yang didukung pengelolaan lingkungan.
- Peningkatan sistem irigasi untuk mendukung terciptanya lahan pertanian bagi penyediaan pangan
- Pengelolaan jaringan pengairan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan berketahanan bencana.
- Pembangunan sistem informasi pembangunan SDA dan drainase.

### - **Bidang Gedung Pemerintah**

- Peningkatan ketersediaan gedung kantor pemerintah yang handal dan berorientasi pada green building.
- Pengelolaan sarana dan prasarana aparatur, sarana dan prasarana olahraga serta sarana dan prasarana umum yang efektif dan efisien.

- **Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman**
  - o Belum optimalnya penyediaan infrastruktur air minum, air limbah, drainase dan persampahan.
  - o Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta adaptif terhadap perubahan iklim dan berketahanan bencana;

**Tabel 2.6.1**

**Teknis Menyimpulkan Isu Strategis PD**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD (1)	PERMASALAHAN PD (2)	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD (3)	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD (7)
			GLOBAL (4)	NASIONAL (5)	REGIONAL (6)	
Mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, integrasi infrastruktur dan penataan utilitas kota	Belum terselesaikannya pembebasan lahan untuk kegiatan pelebaran drainase perkotaan, pembangunan pompa banjir dan pembangunan kolam retensi (bendali)	Optimalisasi Pengelolaan Sanitasi, Limbah, dan Sampah; dan ketersediaan Air Baku	Perubahan Iklim dan Ketahanan Infrastruktur	Ketimpangan Akses Infrastruktur Jalan, Jembatan, Air bersih, dan Sanitasi	Penanggulangan Banjir	Belum optimalnya Infrastruktur Pengendali Banjir
	Curah hujan ekstrem dan kenaikan muka air laut sehingga memperburuk drainase dan risiko rob			Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan		Belum optimalnya ketersediaan Air Baku
	Pembangunan saluran drainase belum didukung oleh suatu system perencanaan dan pemrograman yang akurat karena belum terlaksananya kegiatan updating system informasi drainase				Kemacetan dan Mobilitas Perkotaan	Aksesibilitas Jalan Wilayah Barat, Utara dan Timur
	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memelihara drainase yang telah terbangun				Akses Air Bersih	Belum tersedianya air baku
	Belum tersedianya sistem informasi drainase perkotaan dan permukiman yang terupdate dengan baik					Penggunaan Pipa HDPE yang ramah lingkungan dan tahan lama
	Keterbatasan lahan dalam pembangunan instalasi sanitasi air limbah					Belum optimalnya Pengelolaan Sanitasi, Limbah, dan Sampah
	Keterbatasan lahan dalam pembangunan sarana persampahan					Masih Kurangnya SDM yang melayani PBG dan SLF
	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah dengan belum menggunakan sistem sanitasi yang aman					Masih Terdapat tenaga kerja konstruksi yang belum bersertifikat ahli dan terampil
	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah dari sumber					Masih kurangnya bangunan pemerintah yang memenuhi berstandar inklusif dan berkelanjutan

## 2.7 Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan terpilih tersebut dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan tersebut.

VISI KOTA	MISI KOTA
BALIKPAPAN KOTA GLOBAL NYAMAN UNTUK SEMUA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun dan Mengembangkan Pemerintah yang Bersih dan Profesional Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat.</li> <li>2. Membangun Dan Mengembangkan Infrastruktur Terpadu Yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Masyarakat Balikpapan.</li> <li>3. Membangun Dan Mengembangkan Kehidupan Sosial Yang Kondusif Untuk Menciptakan Masyarakat Yang Sehat Dan Terdidik.</li> <li>4. Mengembangkan Perekonomian Yang Tumbuh Berkeadilan Untuk Semua.</li> <li>5. Konsisten Menjaga Lingkungan Hidup Yang Sehat Dan Nyaman Untuk Semua.</li> </ol>

### 2.7.1. Visi

Visi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJMD Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, mempertimbangkan visi, misi, dan Program kepala daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024, serta memperhatikan RKP Tahun 2022 Visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 adalah:

#### **“BALIKPAPAN KOTA GLOBAL NYAMAN UNTUK SEMUA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN”**

Merujuk pada RPJMD Kota Balikpapan, fokus pembangunan jangka menengah periode 2025-2029 diarahkan pada pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan daya saing perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan keunggulan daerah, yang ditujukan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan dengan fokus pembangunan

lebih diorientasikan bagaimana mewujudkan Kota Balikpapan sebagai kota jasa terkemuka. Oleh karena itu, Visi RPJMD Kota Balikpapan 2025-2029 adalah :

**" BALIKPAPAN KOTA GLOBAL NYAMAN UNTUK SEMUA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN "**

Visi RPJMD Kota Balikpapan 2025-2029 tersebut selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

**KOTA GLOBAL** Kota global merujuk pada kondisi yang mencerminkan Kota Balikpapan yang maju, modern, tangguh, inovatif, dan setara dengan kemajuan kota besar yang ada didunia. Kota global juga mencerminkan kesinambungan pembangunan yang semakin progresif diberbagai bidang seperti ekonomi, infrastruktur, sosial budaya, lingkungan, dan pelayanan publik. Kota Balikpapan sendiri memiliki posisi dan peran penting dalam pembangunan regional, nasional, maupun global. Balikpapan mendukung peran pembangunan wilayah Pulau Kalimantan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di kawasan Timur Indonesia. Sebagai Kawasan Perkotaan Besar, Kota Balikpapan juga memiliki peran besar terhadap pusat perdagangan barang dan jasa, serta industri yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

**NYAMAN UNTUK SEMUA** Nyaman untuk semua mencerminkan upaya menciptakan lingkungan, layanan, dan kebijakan yang dapat dinikmati dan diakses oleh semua kalangan tanpa memandang latar belakang, fisik, usia, dan status sosial. Nyaman untuk semua bertujuan untuk memastikan pembangunan berjalan secara inklusif yang berfokus pada kenyamanan dan aksesibilitas bagi setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk semua juga merujuk pada realitas sosiokultural bahwa masyarakat Balikpapan yang cukup heterogen dan multikultur, sehingga menjadikan Kota Balikpapan sebagai kota milik bersama yang inklusif, damai dan kondusif.

**MADINATUL IMAN** Madinatul Iman merujuk kepada aspek spiritualitas yang mewarnai seluruh aktivitas penduduk Kota Balikpapan. Sebagai aspek spiritual, konsep madinatul iman memiliki lima prinsip sebagai berikut:

- Spiritualitas menjadi roh dari seluruh kegiatan masyarakat
- Manusia dengan spiritualitas menjadi pusat pembangunan
- Seluruh masyarakat ikut terlibat aktif dalam perencanaan dan implementasi rencana kota
- Transparansi dalam seluruh kegiatan masyarakat dan pemerintah
- Kolaborasi/kerjasama lebih diprioritaskan daripada kompetisi disegala aspek kehidupan.

### 2.7.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Misi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, kerangka 5 (lima) Misi Pembangunan dan 9 (Sembilan) Program Prioritas Kepala Daerah terpilih sebagai berikut:

**Misi Pertama** : Misi ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pemerintahan yang bersih menjadi landasan utama untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Kota Balikpapan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik, setiap kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat.

Selain itu, profesionalitas ASN menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi ASN, pemanfaatan TIK, dan peningkatan penerapan standar pelayanan pemerintah daerah sehingga dapat memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, efektif, dan efisien. Dari hal tersebut masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah yang benar-benar berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat maupun kemajuan daerah.

Berangkat dari hal tersebut, pemerintahan yang bersih dan profesionalitas tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kinerja birokrasi semata, melainkan juga untuk memperkuat demokrasi lokal dan keadilan sosial. Pemerintah dituntut lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga akan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perekonomian daerah, stabilitas daerah, dan kesejahteraan masyarakat serta mampu menciptakan Kota Balikpapan yang nyaman untuk semua. Prasyarat yang dibutuhkan untuk mendorong misi ini adalah komitmen yang kuat dan kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat yang semakin meningkat.



**Misi Kedua** : Pembangunan bertujuan untuk memberikan layanan infrastruktur terpadu dan menjangkau seluruh wilayah yang dapat diakses oleh masyarakat Kota Balikpapan. Infrastruktur terpadu meliputi pengembangan infrastruktur dasar wilayah dan utilitas perkotaan yang menitikberatkan pada penyediaan air minum, pengendalian banjir, pengembangan konektivitas berkelanjutan, penyediaan sarana dan prasarana transportasi massal, penataan pedestrian dan utilitas kota, pengembangan kawasan permukiman yang layak huni, penataan kawasan kumuh, dan mewujudkan Kota Balikpapan Terang.

Pemerintah Kota Balikpapan berupaya untuk mengembangkan layanan infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah Kota Balikpapan, sehingga mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Keterpaduan layanan infrastruktur diharapkan mampu memberikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi, perbaikan kualitas lingkungan, peningkatan kehidupan sosial masyarakat, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Balikpapan, sehingga mampu meningkatkan daya saing kota.

**Misi Ketiga** : Bertujuan untuk memberikan penekanan terhadap pentingnya menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, aman, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Kehidupan sosial yang harmonis dan kondusif mencakup berbagai aspek, seperti toleransi antarwarga, ketertiban umum, serta layanan publik yang inklusif, merujuk pada keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban individu di masyarakat.

Adanya kondisi lingkungan sosial yang harmonis dan kondusif dapat mendukung aktivitas sehari-hari Masyarakat secara lebih nyaman, berpartisipasi

dalam pembangunan, serta mengakses berbagai fasilitas dan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah.

Selain itu, misi ini juga memberikan penekanan pada dua aspek utama pembangunan yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat, yaitu kesehatan dan pendidikan. Pemerintah Kota Balikpapan berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan Masyarakat secara lebih merata, guna mewujudkan Masyarakat yang sehat dan sejahtera. Pada bidang pendidikan, pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas guna menciptakan generasi yang cerdas dan berdaya saing. Dengan adanya masyarakat yang sehat dan terdidik, diharapkan pembangunan Kota Balikpapan dapat berjalan lebih efektif

dan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan sosial dan ekonomi Kota Balikpapan semakin meningkat.

**Misi Keempat** : Mengembangkan perekonomian yang tumbuh berkeadilan untuk semua menjadi fokus pembangunan ekonomi yang menjamin pemerataan kesempatan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat di Kota Balikpapan. Pembangunan ekonomi daerah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga memastikan seluruh penduduk di Kota Balikpapan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

Pengembangan sektor industri dan jasa yang bernilai tambah tinggi menjadi kunci pembangunan ekonomi yang berkeadilan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara lebih spesifik, UMKM, IKM, dan

ekonomi kreatif akan diarahkan menjadi pengungkit perekonomian Kota Balikpapan ke depan. Karakteristik UMKM, IKM, dan ekonomi kreatif yang dapat diakses oleh siapa saja menjadi kunci dalam mewujudkan perekonomian yang berkeadilan untuk semua. Selain itu, nilai tambah yang dihasilkan oleh ketiga kelompok ini dapat memberikan multiplier effect kepada seluruh lapangan usaha

di Kota Balikpapan sehingga produktivitas ekonomi daerah dapat meningkat.

**Misi Kelima** : Bertujuan agar lingkungan tetap terjaga dan lestari. Muara lebih lanjut lagi dari kondisi tersebut yakni lingkungan yang sehat dan nyaman bagi masyarakat dan berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat. Dengan demikian, integrasi antara pelestarian lingkungan dan pembangunan daerah harus dilakukan dengan bijak dan perencanaan yang matang.

Diantara aspek penting dalam menjaga lingkungan dalam pembangunan daerah adalah mengurangi pencemaran yang dapat muncul akibat aktivitas industri, urbanisasi, dan eksploitasi sumber daya alam. Pencemaran udara, air, dan tanah dapat berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat serta ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang mengutamakan keberlanjutan, seperti pengelolaan limbah yang efektif, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan pengurangan emisi karbon, harus diterapkan secara konsisten dalam setiap proyek pembangunan di Kota Balikpapan.

Keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan juga sangat penting. Upaya pelibatan tersebut ditempuh melalui peningkatan kapasitas dalam menjaga lingkungan, diantaranya dalam bentuk edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan, dengan harapan agar masyarakat dapat memahami pentingnya keseimbangan ekosistem dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Lebih lanjut lagi, pola kinerja kolaborasi antar pihak perlu dikuatkan untuk menjaga lingkungan, diantaranya melalui kerjasama dalam mengadakan program penghijauan, perlindungan daerah tangkapan air, serta inisiatif yang mendorong gaya hidup ramah lingkungan di tingkat lokal. Dengan langkah- langkah konkret yang mempertimbangkan aspek lingkungan dalam setiap keputusan pembangunan, kedepan diharapkan dapat menciptakan daerah yang maju tanpa mengorbankan keseimbangan alam, sehingga memberikan manfaat bagi generasi saat ini maupun yang akan datang.

### **2.7.3 Program Kerja**

Berdasarkan Visi dan Misi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 tersebut di atas, misi ke-2 Membangun Dan Mengembangkan Infrastruktur Terpadu Yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Masyarakat Balikpapan. Adapun pokok tujuan dan sasaran misi tersebut adalah Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur melalui peningkatan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar Untuk mencapai hal tersebut dilaksanakan melalui program prioritas yaitu antara lain:

- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- Program Pengendalian Banjir
- Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
- Program Pembangunan /Rehabilitasi Bangunan Gedung
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

**BAB III**

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS  
PEKERJAAN UMUM**

**3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DPU KOTA BALIKPAPAN TAHUN  
2025-2029**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.3. berikut ini.

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM</b>											
- Meningkatkan Infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Terpadu dan Berkualitas		Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum (Indeks)	57,59	55,4	61,05	64,65	67,84	71,26	74,11	
		Meningkatnya Kinerja Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WIS Kewenangan Kabupaten (%)	52,15	52,37	52,6	52,82	53,03	53,25	53,46	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	94,39	94,41	94,45	94,49	95,56	96,21	99,51	
			Persentase Infrastruktur Sanitasi dalam Kondisi Aman dan Berkelanjutan (%)	52,73	53,11	53,91	54,97	56	56,77	57,61	
		Meningkatnya Keandalan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Layak Pungsi (%)	56,69	56,81	56,96	57,1	57,26	57,43	57,65	
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Tingkat Kematapan Jalan kabupaten/kota (%)	63,05	63,05	63,93	64,01	64,09	64,17	64,26	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Nilai)	11,45	13,95	25,4	35	45	55	65	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	79,55	79,55	80	80,05	80,1	80,15	80,2	

**3.2 PENAHAPAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM**

Penahapan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pekerjaan Umum (PU) merupakan proses sistematis dalam merancang arah kebijakan, program, dan kegiatan selama periode lima tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut ini adalah tahapan umum dalam penyusunan Renstra Dinas PU disajikan dalam Tabel 3.4. berikut ini:

**Tabel 3.4**  
**Penahapan Renstra PD**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemantapan kelembagaan SIMBG Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dan Peningkatan Kapasitas SDM sekretariat SIMBG, TPT, Penilik, TPA dan Sosialisasi Terkait Pengurusan PBG/SLF	Optimalisasi Koordinasi antar OPD yang mengampu PBG/SLF dan Sosialisasi Terkait Pengurusan PBG/SLF	Optimalisasi Sosialisasi Terkait Pengurusan PBG/SLF	Optimalisasi pengawasan terhadap ketertiban PBG/SLF gedung di Kota Balikpapan	Perwujudan bangunan gedung yang andal, kesetaraan gender, dan berwawasan green building di kota Balikpapan
Pemantapan perencanaan infrastruktur jalan dan jembatan, Layanan Infrastruktur SDA dan Drainase, dan Layanan Infrastruktur air bersih dan Sanitasi	Ketersediaan Lahan untuk Pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan, Layanan Infrastruktur SDA dan Drainase, dan Layanan Infrastruktur air bersih dan Sanitasi	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan, SDA dan Drainase, dan Infrastruktur air bersih dan Sanitasi	Optimalisasi Aksesibilitas Jalan dan Jembatan, Layanan Infrastruktur SDA dan Drainase, dan Layanan Infrastruktur air bersih dan Sanitasi	Perwujudan konektivitas jalan dan jembatan, Layanan Infrastruktur SDA dan Drainase, dan Layanan Infrastruktur air bersih dan Sanitasi
Pemantapan fondasi Pembinaan Jasa Konstruksi dengan pembentukan Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi	Pembentukan lembaga Masyarakat Jasa Konstruksi sebagai stakeholder pelaksanaan pembinaan Jasa Konstruksi	Peningkatan kapasitas Pelaku Jasa Konstruksi, baik Lembaga maupun Personil Lapangan	Optimalisasi pengawasan pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi secara kelembagaan kepada pelaku jasa konstruksi	Perwujudan kota Balikpapan sebagai kota Zero Accident pada bidang konstruksi

### 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD

merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Capaian kinerja Dinas PU Kota Balikpapan 5 tahun terakhir ini telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Resntra PD**

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya Pemerataan infrastruktur Wilayah	Ranwal RPJMD	Meningkatkan kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	
			Menurunkan Luasan Kawasan Genangan	
			Meningkatkan kualitas layanan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum	
			Meningkatkan kualitas Bangunan yang berstandar dan laik fungsi	
			Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang bersertifikat	
			Menurunnya jumlah kecelakaan kerja konstruksi	
			Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum	

**BAB IV**

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA  
PENYELENGGARA URUSAN**

**4.1 URAIAN PROGRAM DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2025-2029**

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, dengan menentukan Outcome dan Indikator program sebagai berikut:

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PERANGKAT DAERAH (BIDANG)
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Bidang SDA dan Drainase
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Bidang SDA dan Drainase
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Bidang SDA dan Drainase
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses aman masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Bidang Penyehatan Lingkungan
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Penyediaan Prasarana Pengelolaan Persampahan Regional	Bidang Penyehatan Lingkungan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya akses aman masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman dan berkelanjutan (Persentase RT yang memiliki akses sanitasi aman)	Bidang Penyehatan Lingkungan
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Rasio kepatuhan PBG kabupaten/ kota	Bidang Gedung Pemerintah
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Bidang Jalan dan Jembatan
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Rasio tenaga operator/tekhnisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Bidang Gedung Pemerintah
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Bidang Gedung Pemerintah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Sekretariat

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD. Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan Urusan

Pekerjaan Umum pada tahun 2025-2029, Dinas Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan akan melaksanakan 9 pogram pembangunan, sebagai berikut :

1. Program pengelolaan sumber daya air (sda)
2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
3. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
4. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
5. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
6. Program penataan bangunan gedung
7. Program penyelenggaraan jalan
8. Program pengembangan jasa konstruksi
9. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

#### **4.2 Uraian Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029**

Kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dalam rangka kerjasama dengan pihak yang berkepentingan, serta masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.



**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**  
**RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD**  
**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM</b>							
- Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Terpadu dan Berkualitas	Meningkatnya Kinerja Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Terbangunnya Struktur/Bangunan pengaman Pantai	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum (Indeks)		
					Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (%)		
					Persentase Bangunan SDA dalam Kondisi Baik (%)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
					Rasio luas daerah irigasi kewenangkabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
					Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun (Unit)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan (Unit)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun (Unit)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi (Unit)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan (Unit)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun (Unit)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun (Unit)	1.03.02.2.01.0013 - Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	
					Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun (Unit)	1.03.02.2.01.0019 - Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	
					Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	1.03.02.2.01.0028 - Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	
					Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai	
					Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan (Unit)	1.03.02.2.01.0097 - Peningkatan Polder/Kolam Retensi	
					Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan (Unit)	1.03.02.2.01.0100 - Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
					Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.2.01.0120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	
					Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi (Unit)	1.03.02.2.01.0123 - Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	
					Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun (Unit)	1.03.02.2.01.0124 - Pembangunan Polder/Kolam Retensi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Tersedianya jaringan irigasi primer dan sekunder yang berfungsi (panjang dalam meter)		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.2.01.0128 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
					Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan (UNIT)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	1.03.02.2.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
					Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)	1.03.02.2.02.0044 - Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	
					Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan (UNIT)	1.03.02.2.02.0048 - Peningkatan Bendung Irigasi	
					Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan		Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersusunnya Jaringan Drainase terintegrasi	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya (Kawasan Genangan)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
					Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan)	1.03.06.2.01.0021 - Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	
					Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya (Kawasan Genangan)	1.03.06.2.01.0027 - Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01.0028 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	1.03.06.2.01.0030 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)		
					Persentase Infrastruktur Sanitasi dalam Kondisi Aman dan Berkelanjutan (%)		
		Meningkatnya layanan persampahan regional		Berkurangnya Volume sampah yang dibuang ke TPA melalui Peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	Persentase Ketercukupan Prasarana Pengelolaan Persampahan Regional (%)	1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit)	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari)	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari)	1.03.04.2.01.0013 - Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	1.03.04.2.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	
					Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit)	1.03.04.2.01.0016 - Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
					Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	
		Meningkatnya akses aman masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Aman dan Berkelanjutan (%)	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya infrastruktur pengolahan air limbah domestik	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi (Unit)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi (Unit)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun (M <sup>3</sup> /Hari)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (M <sup>3</sup> /Hari)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan (M <sup>3</sup> /Hari)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (M <sup>3</sup> /Hari)	1.03.05.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi (Unit)	1.03.05.2.01.0024 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun (M <sup>3</sup> /Hari)	1.03.05.2.01.0025 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi (Unit)	1.03.05.2.01.0029 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan (M <sup>3</sup> /Hari)	1.03.05.2.01.0032 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
					Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	1.03.05.2.01.0040 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
			Meningkatnya akses aman masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Jumlah Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan (PDAM)	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	1.03.03.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	
					Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang)	1.03.03.2.01.0024 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	1.03.03.2.01.0031 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	1.03.03.2.01.0033 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	
		Meningkatnya Keandalan Bangunan Gedung			Persentase Bangunan Gedung yang Layak Fungsi (%)		
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung		Persentase Kepatuhan PBG Kabupaten/kota (%)	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terselenggaranya pelayanan perizinan mendirikan bangunan (IMB) dan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan kesesuaian tata ruang di wilayah kabupaten/kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
					Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
					Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
					Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)	1.03.08.2.01.0017 - Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan			Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman		Tingkat Konektivitas Jalan (%)	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
				Jalan dan Jembatan Kabupaten/Kota dalam Kondisi Mantap	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang jembatan yang dilebarkan (Meter)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
					Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Panjang jembatan yang dilebarkan (Meter)	1.03.10.2.01.0049 - Pelebaran Jembatan	
					Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan	
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan	
					Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	1.03.10.2.01.0057 - Penggantian Jembatan	
					Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan	
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan	
					Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM)	1.03.10.2.01.0060 - Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	
					Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)	1.03.10.2.01.0068 - Pelebaran Jalan Menuju Standar	
					Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Nilai)		
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi		Persentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi (%)	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
					Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
				Tersedianya dokumentasi kegiatan pelatihan dan Tercapainya Jumlah peserta yang dilatih (orang)	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Database Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Jasa Konstruksi di Daerah	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	1.03.11.2.04.0007 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.11.2.04.0010 - Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersusun sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Laporan realisasi anggaran perangkat daerah secara berkala dan akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan perangkat daerah		1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Data dan dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tertib dan akuntabel		1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Laporan pelaksanaan administrasi umum dan pengelolaan sarana perkantoran secara efektif dan efisien	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.03.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Barang milik daerah dalam kondisi baik dan fungsional melalui kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
1.03.0.00.0.00.01.0001 - UPTD DRAINASE DAN BOZEM								
- Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Terpadu dan Berkualitas	Meningkatnya Kinerja Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi		Persentase Bangunan SDA dalam Kondisi Baik (%)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
				Terbangunnya Struktur/Bangunan pengaman Pantai	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
					Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.02.2.01.0082 - Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi		
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan		Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
				Tersedianya Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan		
1.03.0.00.0.00.01.0002 - UPTD PERAWATAN JALAN DAN JEMBATAN								
- Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Terpadu dan Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman		Tingkat Konektivitas Jalan (%)	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
				Terselenggaranya pemeliharaan jalan dan jembatan yang berkualitas	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan	

#### 4.3 URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN  
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
103 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				796.770.527.981		2.173.871.953.750		2.517.510.903.750		2.483.333.764.850		2.382.995.748.175		
103.01- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		78	81	34.369.976.932	82	41082.653.750	83	40.337.653.750	84	40.592.653.750	85	40.597.653.750		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah			34.369.976.932		41082.653.750		40.337.653.750		40.592.653.750		40.597.653.750	103.0.00.0.00.010000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	
103.012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				319.820.820		375.000.000		375.000.000		375.000.000		375.000.000	103.0.00.0.00.010000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	
Dokumen Perencanaan, Penganggraan dan Evaluasi yang tersusun sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	319.820.820	2	375.000.000	2	375.000.000	2	375.000.000	2	375.000.000	103.0.00.0.00.010000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	
103.012.010001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				319.820.820		375.000.000		375.000.000		375.000.000		375.000.000	103.0.00.0.00.010000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	319.820.820	2	375.000.000	2	375.000.000	2	375.000.000	2	375.000.000	103.0.00.0.00.010000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	
103.012.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				23.743.611.957		27.305.153.750		27.305.153.750		27.305.153.750		27.305.153.750	103.0.00.0.00.010000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Laporan realisasi anggaran perangkat daerah secara berkala dan akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		146	23.743.611.957	146	27.305.153.750	146	27.305.153.750	146	27.305.153.750	146	27.305.153.750	103.0.00.0.00.010000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	
103.012.02.0001- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				23.743.611.957		27.305.153.750		27.305.153.750		27.305.153.750		27.305.153.750	103.0.00.0.00.010000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		146	23.743.611.957	146	27.305.153.750	146	27.305.153.750	146	27.305.153.750	146	27.305.153.750	103.0.00.0.00.010000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	
103.012.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													103.0.00.0.00.010000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	
Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan perangkat													103.0.00.0.00.010000 -	
103.012.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				780.000.000		1.150.000.000		1.150.000.000		1.150.000.000		1.150.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
Data dan dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tertib dan akuntabel	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang		146	-	146	300.000.000	146	300.000.000	146	300.000.000	146	300.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		150	780.000.000	150	850.000.000	150	850.000.000	150	850.000.000	150	850.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
103.012.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				-		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		146	-	146	300.000.000	146	300.000.000	146	300.000.000	146	300.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
103.012.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				780.000.000		850.000.000		850.000.000		850.000.000		850.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang		150	780.000.000	150	850.000.000	150	850.000.000	150	850.000.000	150	850.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
103.012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.630.811.070		2.970.000.000		3.225.000.000		3.480.000.000		3.485.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
Laporan pelaksanaan administrasi umum dan pengelolaan sarana perkantoran secara efektif dan efisien	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		9	50.000.000	9	60.000.000	9	65.000.000	9	70.000.000	9	75.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem		10	978.698.000	10	1.000.000.000	10	1.250.000.000	10	1.500.000.000	10	1.500.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis		10	650.000.000	10	700.000.000	10	700.000.000	10	700.000.000	10	700.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		8	175.000.000	8	200.000.000	8	200.000.000	8	200.000.000	8	200.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat		425	50.000.000	430	60.000.000	435	60.000.000	440	60.000.000	445	60.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		50	627.113.070	50	750.000.000	50	750.000.000	50	750.000.000	50	750.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang		2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang		1	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
	103.012.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				50.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		75.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		9	50.000.000	9	60.000.000	9	65.000.000	9	70.000.000	9	75.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
103.012.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				978.698.000		1.000.000.000		1.250.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang		10	978.698.000	10	1.000.000.000	10	1.250.000.000	10	1.500.000.000	10	1.500.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
103.012.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				650.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		10	650.000.000	10	700.000.000	10	700.000.000	10	700.000.000	10	700.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
103.012.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				175.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	-	8	175.000.000	8	200.000.000	8	200.000.000	8	200.000.000	8	200.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
103.012.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				50.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	425	50.000.000	430	60.000.000	435	60.000.000	440	60.000.000	445	60.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
103.012.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				627.113.070		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	-	50	627.113.070	50	750.000.000	50	750.000.000	50	750.000.000	50	750.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
103.012.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	-	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
103.012.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	-	1	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
103.012.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.621.066.200		3.650.000.000		2.650.000.000		2.650.000.000		2.650.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan perangkat	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	-		-	1	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	103.0.00.0.00.010000 -	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	7	1.621.066.200	2	1.850.000.000	2	1.850.000.000	2	1.850.000.000	2	1.850.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.0.00.0.00.010000 -	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	-		-	25	300.000.000	25	300.000.000	25	300.000.000	25	300.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	-		-	25	500.000.000	25	500.000.000	25	500.000.000	25	500.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
103.012.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		1.000.000.000		-		-		-	103.0.00.0.00.010000 -	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	-	-	-	1	1.000.000.000		-	-	-	-	-	103.0.00.0.00.010000 -	
103.012.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.621.066.200		1.850.000.000		1.850.000.000		1.850.000.000		1.850.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	7	1.621.066.200	2	1.850.000.000	2	1.850.000.000	2	1.850.000.000	2	1.850.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
103.012.07.0003 - Pengadaan Alat Besar				-		-		-		-		-	103.0.00.0.00. 010000 -	
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.0.00.0.00. 010000 -	
103.012.07.0005 - Pengadaan Mebel				-		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	25	300.000.000	25	300.000.000	25	300.000.000	25	300.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
103.012.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	-		-	25	500.000.000	25	500.000.000	25	500.000.000	25	500.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
103.012.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.392.235.735		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
Laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyediaan jasa penunjang urusan pemerint ah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.0.00.0.00. 010000 -	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	-	5	1472.392.000	5	1500.000.000	5	1500.000.000	5	1500.000.000	5	1500.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	5	1919.843.735	5	2.000.000.000	5	2.000.000.000	5	2.000.000.000	5	2.000.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
103.012.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													103.0.00.0.00. 010000 -	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.0.00.0.00. 010000 -	
103.012.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1472.392.000		1500.000.000		1500.000.000		1500.000.000		1500.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan		5	1472.392.000	5	1500.000.000	5	1500.000.000	5	1500.000.000	5	1500.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
103.012.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1919.843.735		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	5	1919.843.735	5	2.000.000.000	5	2.000.000.000	5	2.000.000.000	5	2.000.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
103.012.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1882.431.150		2.132.500.000		2.132.500.000		2.132.500.000		2.132.500.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
Barang milik daerah dalam kondisi baik dan fungsional melalui kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	-	2	200.000.000	2	230.000.000	2	230.000.000	2	230.000.000	2	230.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	8	421312.000	8	500.000.000	8	500.000.000	8	500.000.000	8	500.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	-	6	150.000.000	6	172.500.000	6	172.500.000	6	172.500.000	6	172.500.000	103.0.00.0.00.010000 -	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	58	911.119.150	58	1.000.000.000	58	1.000.000.000	58	1.000.000.000	58	1.000.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	-	1	200.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
1.03.012.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas				150.000.000		172.500.000		172.500.000		172.500.000		172.500.000	103.0.00.0.00.010000 -	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	-	6	150.000.000	6	172.500.000	6	172.500.000	6	172.500.000	6	172.500.000	103.0.00.0.00.010000 -	
1.03.012.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas				911.119.150		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	58	911.119.150	58	1.000.000.000	58	1.000.000.000	58	1.000.000.000	58	1.000.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
1.03.012.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				421312.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	8	421312.000	8	500.000.000	8	500.000.000	8	500.000.000	8	500.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
1.03.012.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		230.000.000		230.000.000		230.000.000		230.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	-	1	200.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
1.03.012.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		230.000.000		230.000.000		230.000.000		230.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	-	2	200.000.000	2	230.000.000	2	230.000.000	2	230.000.000	2	230.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				34.853.640.000		354.912.500.000		543.750.000.000		486.687.500.000		244.075.000.000		
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang	52,15	52,6	26.000.000.000	58,82	334.312.500.000	53,03	538.150.000.000	53,25	481.087.500.000	53,46	237.975.000.000		
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota	11,66	35,23	8.853.640.000	53,41	20.600.000.000	71,59	5.600.000.000	89,77	5.600.000.000	100,00	6.100.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1				26.000.000.000		334.312.500.000		538.150.000.000		481.087.500.000		237.975.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terbangunnya Struktur/ Bangunan pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen	-	0	-	6	227.500.000.000	5	477.000.000.000	2	402.000.000.000	1	202.000.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen	-	1	12.500.000.000	1	12.500.000.000	1	12.500.000.000	1	12.500.000.000	1	12.500.000.000		
	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	-	10	10.000.000.000	10	10.000.000.000	10	10.000.000.000	10	10.000.000.000	10	10.000.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	-		-		-	1	500.000.000		-		-	103.0.00.0.00.010000 -	
	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibanun	-	-	-	2	59.062.500.000	-	-	1	35.437.500.000	-	-	103.0.00.0.00.010000 -	
	Jumlah Polder/ Kolam Retensi yang Ditingkatkan	-		-	1	10.100.000.000	1	15.100.000.000		-		-	103.0.00.0.00.010000 -	
	Jumlah Polder/ Kolam Retensi yang Direhabilitasi	-	0	-	2	400.000.000	1	200.000.000	2	400.000.000	3	600.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
	Jumlah Polder/ Kolam Retensi yang Dibanun	-	0	-	1	10.500.000.000	1	15.750.000.000	1	15.750.000.000	1	7.875.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
	Jumlah Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir yang	-		-		-	3	2.100.000.000		-		-	103.0.00.0.00.010000 -	
	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	-	0	-	3	750.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
103.02.2.010013 - Pembangunan Stasiun Pompa Banjir				-		59.062.500.000		-		35.437.500.000		-	103.0.00.0.00.010000 -	
Terbangunnya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibanun	-	-	-	2	59.062.500.000	-	-	1	35.437.500.000	-	-	103.0.00.0.00.010000 -	
103.02.2.010019 - Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)				-		750.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
Terbangunnya Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	-	0	-	3	750.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
103.02.2.010028 - Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir				-		-		500.000.000		-		-	103.0.00.0.00.010000 -	
Terehabilitasinya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	-					1	500.000.000					103.0.00.0.00.010000 -	
103.02.2.010093 - Normalisasi/ Restorasi Sungai				10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
Terlaksananya Normalisasi/ Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	-	10	10.000.000.000	10	10.000.000.000	10	10.000.000.000	10	10.000.000.000	10	10.000.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
103.02.2.010097 - Peningkatan Polder/ Kolam Retensi				-		10.100.000.000		15.100.000.000		-		-	103.0.00.0.00.010000 -	
Meningkatnya Polder/ Kolam Retensi	Jumlah Polder/ Kolam Retensi yang Ditingkatkan	-			1	10.100.000.000	1	15.100.000.000					103.0.00.0.00.010000 -	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
103.02.2.010100 - Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir				-		-		2.100.000.000		-			103.0.00.0.00. 01.00000 -	
Meningkatnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang	-					3	2.100.000.000					103.0.00.0.00. 01.00000 -	
103.02.2.010120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hdip untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan				-		227.500.000.000		477.000.000.000		402.000.000.000		202.000.000.000	103.0.00.0.00. 01.00000 -	
Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen	-	0	-	6	227.500.000.000	5	477.000.000.000	2	402.000.000.000	1	202.000.000.000		103.0.00.0.00. 01.00000 -	
103.02.2.010123 - Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi				-		400.000.000		200.000.000		400.000.000		600.000.000	103.0.00.0.00. 01.00000 -	
Terehabilitasinya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi	-	0	-	2	400.000.000	1	200.000.000	2	400.000.000	3	600.000.000	103.0.00.0.00. 01.00000 -	
103.02.2.010124 - Pembangunan Polder/Kolam Retensi				-		10.500.000.000		15.750.000.000		15.750.000.000		7.875.000.000	103.0.00.0.00. 01.00000 -	
Terbangunnya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	-	0	-	1	10.500.000.000	1	15.750.000.000	1	15.750.000.000	1	7.875.000.000	103.0.00.0.00. 01.00000 -	
103.02.2.010128 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi				12.500.000.000		12.500.000.000		12.500.000.000		12.500.000.000		12.500.000.000	103.0.00.0.00. 01.00000 -	
Tersusunnya Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung,	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen	-	1	12.500.000.000	1	12.500.000.000	1	12.500.000.000	1	12.500.000.000	1	12.500.000.000	103.0.00.0.00. 01.00000 -	
103.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang				8.853.640.000		20.600.000.000		5.600.000.000		5.600.000.000		6.100.000.000	103.0.00.0.00. 01.00000 -	
Tersedianya jaringan irigasi primer dan sekunder yang berfungsi (panjang dalam meter)	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	103.0.00.0.00. 01.00000 -	
	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	-	0	-	1	15.000.000.000	-	-	-	-	-	-	103.0.00.0.00. 01.00000 -	
	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen	-	1	265.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	103.0.00.0.00. 01.00000 -	
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	-	2	8.488.640.000		5.500.000.000		5.500.000.000		5.500.000.000		5.500.000.000	103.0.00.0.00. 01.00000 -	
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	-	0	-	-	-	-	-	-	-	1	500.000.000	103.0.00.0.00. 01.00000 -	
103.02.2.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan													103.0.00.0.00. 01.00000 -	
Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	-	2	8.488.640.000		5.500.000.000		5.500.000.000		5.500.000.000		5.500.000.000	103.0.00.0.00. 01.00000 -	
103.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan													103.0.00.0.00. 01.00000 -	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	-	0	-	-	-	-	-	-	-	1	500.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
103.02.2.02.0044 - Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi													103.0.00.0.00.010000 -	
Terfasilitasinya operasional kegiatan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
103.02.2.02.0048 - Peningkatan Bendung Irigasi													103.0.00.0.00.010000 -	
Meningkatnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	-	0	-	1	15.000.000.000	-	-	-	-	-	-	103.0.00.0.00.010000 -	
103.02.2.02.0035 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan													103.0.00.0.00.010000 -	
Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	-	1	265.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	103.0.00.0.00.010000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	
Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota	48,43		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000	103.0.00.0.00.010001-	
103.02.2.01- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1				3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000	103.0.00.0.00.010001-	
Terbangunnya Struktur/Bangunan pengaman Pantai	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan	-	100,00%	3.500.000.000	100,00%	3.500.000.000	100,00%	3.500.000.000	100,00%	3.500.000.000	100,00%	3.500.000.000	103.0.00.0.00.010001-	
103.02.2.01.0082 - Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi				3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000	103.0.00.0.00.010001-	
Beroperasi dan Terpeliharanya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan	-	100,00%	3.500.000.000	100,00%	3.500.000.000	100,00%	3.500.000.000	100,00%	3.500.000.000	100,00%	3.500.000.000	103.0.00.0.00.010001-	
103.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR		81,63	81,67	5.000.000.000	81,70	226.950.000.000	82,75	425.625.000.000	85,39	428.185.000.000	86,98	422.900.000.000		
Meningkatnya akses aman masyarakat terhadap sistem pervediaan air minum	Persentase rumah tangga dengan akses air minum			5.000.000.000		226.950.000.000		425.625.000.000		428.185.000.000		422.900.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
103.03.2.01- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah				5.000.000.000		226.950.000.000		425.625.000.000		428.185.000.000		422.900.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
Jumlah Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan (PDAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	-	1	-	1	7.850.000.000	1	7.850.000.000	1	7.850.000.000	-	-	103.0.00.0.00.010000 -	
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan	-	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	3	350.000.000	3	400.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	-	10	350.000.000	10	10.000.000.000	12	12.000.000.000	12	13.500.000.000	14	15.000.000.000	103.0.00.0.00.01.00000 -	
	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan	-	0	-	-	-	100	175.000.000	100	185.000.000	100	200.000.000	103.0.00.0.00.01.00000 -	
	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan	-	50	4.350.000.000	50	4.500.000.000	20.000	200.000.000.000	20.000	200.000.000.000	40.000	400.000.000.000	103.0.00.0.00.01.00000 -	
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan	-	0	-	1	4.300.000.000	1	5.300.000.000	1	6.300.000.000	1	7.300.000.000	103.0.00.0.00.01.00000 -	
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	-	0	-	250	200.000.000.000	250	200.000.000.000	250	200.000.000.000	-	-	103.0.00.0.00.01.00000 -	
103.03.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan				-		4.300.000.000		5.300.000.000		6.300.000.000		7.300.000.000	103.0.00.0.00.01.00000 -	
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan	-	0	-	1	4.300.000.000	1	5.300.000.000	1	6.300.000.000	1	7.300.000.000	103.0.00.0.00.01.00000 -	
103.03.2.01.0024 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan				-		-		175.000.000		185.000.000		200.000.000	103.0.00.0.00.01.00000 -	
Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan	-	0	-	-	-	100	175.000.000	100	185.000.000	100	200.000.000	103.0.00.0.00.01.00000 -	
103.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum				350.000.000		10.000.000.000		12.000.000.000		13.500.000.000		15.000.000.000	103.0.00.0.00.01.00000 -	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	-	10	350.000.000	10	10.000.000.000	12	12.000.000.000	12	13.500.000.000	14	15.000.000.000	103.0.00.0.00.01.00000 -	
103.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				-		200.000.000.000		200.000.000.000		200.000.000.000		-	103.0.00.0.00.01.00000 -	
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	-	0	-	250	200.000.000.000	250	200.000.000.000	250	200.000.000.000	-	-	103.0.00.0.00.01.00000 -	
103.03.2.01.0031- Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				300.000.000		300.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000	103.0.00.0.00.01.00000 -	
Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	-	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	3	350.000.000	3	400.000.000	103.0.00.0.00.01.00000 -	
103.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				4.350.000.000		4.500.000.000		200.000.000.000		200.000.000.000		400.000.000.000	103.0.00.0.00.01.00000 -	
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan	-	50	4.350.000.000	50	4.500.000.000	20.000	200.000.000.000	20.000	200.000.000.000	40.000	400.000.000.000	103.0.00.0.00.01.00000 -	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
103.03.2.010033 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan				300.000.000		300.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan	-	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	3	350.000.000	3	400.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
103.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		94,37	96,51	45.879.718.900	97,32	28.000.000.000	98,39	13.400.000.000	98,93	69.100.000.000	100,00	12.300.000.000		
Persentase Penyediaan Sarana Persampahan	Persentase Penyediaan Sarana Persampahan			45.879.718.900		28.000.000.000		13.400.000.000		69.100.000.000		12.300.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
103.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				45.879.718.900		28.000.000.000		13.400.000.000		69.100.000.000		12.300.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
Berkurangnya Volume sampah yang dibuang ke TPA melalui Peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3R	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	-	0,00%	-		2.000.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang	-		41994.718.900		9.800.000.000		4.800.000.000		33.600.000.000		4.800.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-			3.535.000.000		9.800.000.000		4.800.000.000		33.600.000.000		4.800.000.000		
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	-		350.000.000		6.400.000.000		2.300.000.000		400.000.000		1200.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
103.04.2.010015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan													103.0.00.0.00.010000 -	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	-		350.000.000		6.400.000.000		2.300.000.000		400.000.000		1200.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
103.04.2.010016 - Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS													103.0.00.0.00.010000 -	
Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	-	0,00%	-		2.000.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
103.04.2.010013 - Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
Meningkatnya Bangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	-		3.535.000.000		9.800.000.000		4.800.000.000		33.600.000.000		4.800.000.000		
103.04.2.010020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R													103.0.00.0.00.010000 -	
Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang	-		41994.718.900		9.800.000.000		4.800.000.000		33.600.000.000		4.800.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
103.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		11,08	11,31	10.025.000.000	12,61	202.398.800.000	13,61	380.868.800.000	14,61	414.241200.000	15,62	557.844.800.000		
Meningkatnya akses aman masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman dan			10.025.000.000		202.398.800.000		380.868.800.000		414.241200.000		557.844.800.000	103.0.00.0.00.010000 -	
103.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				10.025.000.000		202.398.800.000		380.868.800.000		414.241200.000		557.844.800.000	103.0.00.0.00.010000 -	
Tersedianya infrastruktur pengolahan air limbah domestik	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)					142.348.800.000		331468.800.000		359.091200.000		501244.800.000	103.0.00.0.00.010000 -	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-	1	1.025.000.000	18	19.800.000.000	18	21.600.000.000	18	23.400.000.000	18	25.200.000.000	103.0.00.0.00.01.00000 -	
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	-	-	3.850.000.000	3	15.200.000.000	4	1.150.000.000	4	2.150.000.000	3	300.000.000	103.0.00.0.00.01.00000 -	
	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan	-	100	200.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	103.0.00.0.00.01.00000 -	
	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air	-	0	3.300.000.000	1000	22.000.000.000	1000	24.000.000.000	1000	26.000.000.000	1000	28.000.000.000	103.0.00.0.00.01.00000 -	
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-	0	-	3	900.000.000	2	650.000.000	3	1.050.000.000	2	750.000.000	103.0.00.0.00.01.00000 -	
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-	2	1.650.000.000	3	900.000.000	2	650.000.000	3	1.050.000.000	2	750.000.000	103.0.00.0.00.01.00000 -	
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-	0,00%	-	-	1.000.000.000	-	1.100.000.000	-	1.200.000.000	-	1.300.000.000	103.0.00.0.00.01.00000 -	
103.05.2.01.0032 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman				1.650.000.000		900.000.000		650.000.000		1.050.000.000		750.000.000	103.0.00.0.00.01.00000 -	
Meningkatnya Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-	2	1.650.000.000	3	900.000.000	2	650.000.000	3	1.050.000.000	2	750.000.000	103.0.00.0.00.01.00000 -	
103.05.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala				1.025.000.000		19.800.000.000		21.600.000.000		23.400.000.000		25.200.000.000	103.0.00.0.00.01.00000 -	
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-	1	1.025.000.000	18	19.800.000.000	18	21.600.000.000	18	23.400.000.000	18	25.200.000.000	103.0.00.0.00.01.00000 -	
103.05.2.01.0024 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan				-		1.000.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000	103.0.00.0.00.01.00000 -	
Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-	0,00%	-	-	1.000.000.000	-	1.100.000.000	-	1.200.000.000	-	1.300.000.000	103.0.00.0.00.01.00000 -	
103.05.2.01.0025 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan				-		142.348.800.000		331.468.800.000		359.091.200.000		501.244.800.000	103.0.00.0.00.01.00000 -	
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)					142.348.800.000		331.468.800.000		359.091.200.000		501.244.800.000	103.0.00.0.00.01.00000 -	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
103.05.2.010029 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman					-	900.000.000		650.000.000		1050.000.000		750.000.000	103.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	
Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	-	0		-	900.000.000	2	650.000.000	3	1050.000.000	2	750.000.000	103.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	
103.05.2.010040 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				200.000.000		250.000.000		250.000.000		300.000.000		300.000.000	103.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	
Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-	100	200.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	103.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	
103.05.2.010044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat				3.300.000.000		22.000.000.000		24.000.000.000		26.000.000.000		28.000.000.000	103.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	
Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/ sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	-	0	3.300.000.000	1000	22.000.000.000	1000	24.000.000.000	1000	26.000.000.000	1000	28.000.000.000	103.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	
103.05.2.010045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				3.850.000.000		15.200.000.000		1.150.000.000		2.150.000.000		300.000.000	103.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	-	-	3.850.000.000	3	15.200.000.000	4	1.150.000.000	4	2.150.000.000	3	300.000.000	103.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
103.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		73,97	75,64	188.297.375.444	76,48	388.035.000.000	77,31	359.800.000.000	78,15	243.200.000.000	78,98	319.010.000.000		
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik			188.297.375.444		388.035.000.000		359.800.000.000		243.200.000.000		319.010.000.000	103.0.00.0.00. 010000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	
103.06.2.01- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				170.297.375.444		365.035.000.000		336.800.000.000		219.200.000.000		295.010.000.000	103.0.00.0.00. 010000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	
Tersusunnya Jaringan Drainase terintegrasi	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	-		29.357.796.000		147.000.000.000		151.200.000.000		101.850.000.000		84.000.000.000	103.0.00.0.00. 010000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	-	10	610.000.000	3	1.350.000.000	2	1.150.000.000	2	1.150.000.000	2	1.150.000.000	103.0.00.0.00. 010000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	
	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	-	1500	22.398.032.414	1.500	15.050.000.000	1.500	15.050.000.000	1.500	15.050.000.000	1.500	15.050.000.000	103.0.00.0.00. 010000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	-	5	81098.633.000	2	184.485.000.000	4	152.250.000.000	4	84.000.000.000	2	177.660.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	-	1	5.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	-	1	31832.914.030	1	15.050.000.000	1	15.050.000.000	1	15.050.000.000	1	15.050.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
	Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya	-	1	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
103.06.2.010012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan				22.398.032.414		15.050.000.000		15.050.000.000		15.050.000.000		15.050.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	-	1500	22.398.032.414	1500	15.050.000.000	1500	15.050.000.000	1500	15.050.000.000	1500	15.050.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
103.06.2.010021 - Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan				31832.914.030		15.050.000.000		15.050.000.000		15.050.000.000		15.050.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
Meningkatnya Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	-	1	31832.914.030	1	15.050.000.000	1	15.050.000.000	1	15.050.000.000	1	15.050.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
103.06.2.010024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan				81098.633.000		184.485.000.000		152.250.000.000		84.000.000.000		177.660.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	-	5	81098.633.000	2	184.485.000.000	4	152.250.000.000	4	84.000.000.000	2	177.660.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
103.06.2.010027 - Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan				-		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
Tersusunnya Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya	-	1	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
103.06.2.010028 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				5.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	-	1	5.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
103.06.2.010029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				29.357.796.000		147.000.000.000		151200.000.000		101850.000.000		84.000.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	-		29.357.796.000		147.000.000.000		151200.000.000		101850.000.000		84.000.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
103.06.2.010030 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan				610.000.000		1.350.000.000		1.150.000.000		1.150.000.000		1.150.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	-	10	610.000.000	3	1.350.000.000	2	1.150.000.000	2	1.150.000.000	2	1.150.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	52,15		18.000.000.000		23.000.000.000		23.000.000.000		24.000.000.000		24.000.000.000	103.0.00.0.00. 010001 - UPTD DRAINASE DAN BOZEM	
103.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				18.000.000.000		23.000.000.000		23.000.000.000		24.000.000.000		24.000.000.000	103.0.00.0.00. 010001 - UPTD DRAINASE DAN BOZEM	
Tersedianya Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara		100,00%	18.000.000.000	100,00%	23.000.000.000	100,00%	23.000.000.000	100,00%	24.000.000.000	100,00%	24.000.000.000	103.0.00.0.00. 010001 - UPTD DRAINASE DAN BOZEM	
103.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan				18.000.000.000		23.000.000.000		23.000.000.000		24.000.000.000		24.000.000.000	103.0.00.0.00. 010001 - UPTD DRAINASE DAN BOZEM	
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara		100,00%	18.000.000.000	100,00%	23.000.000.000	100,00%	23.000.000.000	100,00%	24.000.000.000	100,00%	24.000.000.000	103.0.00.0.00. 010001 - UPTD DRAINASE DAN BOZEM	
103.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		90	90	141690.000.000	90,84	336.230.000.000	91,51	205.970.000.000	92,05	199.543.500.000	92,48	209.120.675.000		
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Rasio kepatuhan PBG kabupaten/ kota			141690.000.000		336.230.000.000		205.970.000.000		199.543.500.000		209.120.675.000	103.0.00.0.00. 010000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	
103.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				141690.000.000		336.230.000.000		205.970.000.000		199.543.500.000		209.120.675.000	103.0.00.0.00. 010000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	
Terselenggaranya pelayanan perizinan mendirikan bangunan (IMB) dan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan kesesuaian tata ruang di wilayah kabupaten/kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	-	20	62.825.000.000	20	41.000.000.000	20	44.500.000.000	20	48.000.000.000	20	51.500.000.000	103.0.00.0.00. 010000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	
	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	3	77.540.000.000	3	293.830.000.000	3	160.000.000.000	3	150.000.000.000	3	156.000.000.000	103.0.00.0.00. 010000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	
	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	-	300	1.325.000.000	350	1.400.000.000	400	1.470.000.000	450	1.543.500.000	500	1.620.675.000	103.0.00.0.00. 010000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	
103.08.2.01.0017 - Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				62.825.000.000		41.000.000.000		44.500.000.000		48.000.000.000		51.500.000.000	103.0.00.0.00. 010000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	-	20	62.825.000.000	20	41.000.000.000	20	44.500.000.000	20	48.000.000.000	20	51.500.000.000	103.0.00.0.00. 010000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
103.08.2.010021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk				77.540.000.000		293.830.000.000		160.000.000.000		150.000.000.000		156.000.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan,	-	3	77.540.000.000	3	293.830.000.000	3	160.000.000.000	3	150.000.000.000	3	156.000.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
103.08.2.010023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik				1325.000.000		1400.000.000		1470.000.000		1543.500.000		1620.675.000	103.0.00.0.00.010000 -	
Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	-	300	1325.000.000	350	1400.000.000	400	1470.000.000	450	1543.500.000	500	1620.675.000	103.0.00.0.00.010000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	
103.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		83,85	84,89	334.229.837.825	85,43	593.588.000.000	85,92	545.084.450.000	86,41	599.108.911.100	86,90	574.472.619.425		
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota			334.229.837.825		593.588.000.000		545.084.450.000		599.108.911.100		574.472.619.425	103.0.00.0.00.010000 -	
103.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				323.229.837.825		578.088.000.000		527.084.450.000		579.108.911.100		552.472.619.425	103.0.00.0.00.010000 -	
Jalan dan Jembatan Kabupaten/Kota dalam Kondisi Mantap	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	-	8	96.250.000.000	8	80.000.000.000	8	60.000.000.000	8	85.000.000.000	8	50.000.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	-	2	7.150.000.000	3	7.000.000.000	3	7.490.000.000	3	8.014.300.000	3	8.575.301.000	103.0.00.0.00.010000 -	
	Panjang jembatan yang dilebarkan	-	0	-	1	30.000.000.000	1	25.000.000.000	1	20.000.000.000	-	-	103.0.00.0.00.010000 -	
	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	-	3	16.090.724.250	4	25.000.000.000	2	20.000.000.000	2	25.000.000.000	4	25.000.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
	Panjang jembatan yang dibangun	-	3	765.187.700	3	195.000.000.000	1	178.000.000.000	2	188.000.000.000	2	198.000.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	-	10	76.021.779.027	10	80.464.000.000	10	86.096.480.000	10	92.123.233.600	10	98.571.859.700	103.0.00.0.00.010000 -	
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	-	10	80.402.146.848	10	112.564.000.000	10	120.445.720.000	10	128.875.010.000	10	137.875.720.500	103.0.00.0.00.010000 -	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	-	2	6.000.000.000	1	15.000.000.000	1	16.050.000.000	1	17.173.500.000	1	18.375.645.000	103.0.00.0.00.01.00000 -	
	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	-	2,8	2.500.000.000	3	22.675.000.000	3	2.862.250.000	3	3.062.607.500	3	3.276.990.025	103.0.00.0.00.01.00000 -	
	Panjang Jalan/ Jembatan yang Disurvei Kondisinya	-	48125	250.000.000	484	535.000.000	486	572.000.000	489	612.500.000	491	657.000.000	103.0.00.0.00.01.00000 -	
	Panjang Jalan/ Jembatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	20	6.800.000.000	20	7.450.000.000	20	8.000.000.000	20	8.500.000.000	20	9.200.000.000	103.0.00.0.00.01.00000 -	
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	-	10	31000.000.000	10	2.400.000.000	10	2.568.000.000	10	2.747.760.000	10	2.940.103.200	103.0.00.0.00.01.00000 -	
103.10.2.010029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis				31000.000.000									103.0.00.0.00.01.00000 -	
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	-	10	31000.000.000	10	2.400.000.000	10	2.568.000.000	10	2.747.760.000	10	2.940.103.200	103.0.00.0.00.01.00000 -	
103.10.2.010043 - Survey Kondisi Jalan/ Jembatan				250.000.000									103.0.00.0.00.01.00000 -	
Jalan/ Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/ Jembatan yang Disurvei Kondisinya	-	48125	250.000.000	484	535.000.000	486	572.000.000	489	612.500.000	491	657.000.000	103.0.00.0.00.01.00000 -	
103.10.2.010049 - Pelebaran Jembatan				-									103.0.00.0.00.01.00000 -	
Terlaksananya Pelebaran Jembatan	Panjang jembatan yang dilebarkan	-	0	-	1	30.000.000.000	1	25.000.000.000	1	20.000.000.000	-	-	103.0.00.0.00.01.00000 -	
103.10.2.010053 - Pembangunan Jalan				2.500.000.000									103.0.00.0.00.01.00000 -	
Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	-	2,8	2.500.000.000	3	22.675.000.000	3	2.862.250.000	3	3.062.607.500	3	3.276.990.025	103.0.00.0.00.01.00000 -	
103.10.2.010055 - Rehabilitasi Jalan				76.021.779.027		80.464.000.000		86.096.480.000		92.123.233.600		98.571.859.700	103.0.00.0.00.01.00000 -	
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	-	10	76.021.779.027	10	80.464.000.000	10	86.096.480.000	10	92.123.233.600	10	98.571.859.700	103.0.00.0.00.01.00000 -	
103.10.2.010056 - Pemeliharaan Berkala Jalan				80.402.146.848		112.564.000.000		120.445.720.000		128.875.010.000		137.875.720.500	103.0.00.0.00.01.00000 -	
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	-	10	80.402.146.848	10	112.564.000.000	10	120.445.720.000	10	128.875.010.000	10	137.875.720.500	103.0.00.0.00.01.00000 -	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
103.10.2.010057 - Penggantian Jembatan				16.090.724.250		25.000.000.000		20.000.000.000		25.000.000.000		25.000.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	-	3	16.090.724.250	4	25.000.000.000	2	20.000.000.000	2	25.000.000.000	4	25.000.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
103.10.2.010058 - Rehabilitasi Jembatan				7.150.000.000		7.000.000.000		7.490.000.000		8.014.300.000		8.575.301000	103.0.00.0.00. 010000 -	
Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	-	2	7.150.000.000	3	7.000.000.000	3	7.490.000.000	3	8.014.300.000	3	8.575.301000	103.0.00.0.00. 010000 -	
103.10.2.010059 - Rekonstruksi Jalan				96.250.000.000		80.000.000.000		60.000.000.000		85.000.000.000		50.000.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	-	8	96.250.000.000	8	80.000.000.000	8	60.000.000.000	8	85.000.000.000	8	50.000.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
103.10.2.010060 - Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/ Kota dan Desa				6.800.000.000		7.450.000.000		8.000.000.000		8.500.000.000		9.200.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/ Kota dan Desa	Panjang Jalan/ Jembatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	20	6.800.000.000	20	7.450.000.000	20	8.000.000.000	20	8.500.000.000	20	9.200.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
103.10.2.010068 - Pelebaran Jalan Menuju Standar				6.000.000.000		15.000.000.000		16.050.000.000		17.173.500.000		18.375.645.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	-	2	6.000.000.000	1	15.000.000.000	1	16.050.000.000	1	17.173.500.000	1	18.375.645.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
103.10.2.010069 - Pembangunan Jembatan				765.187.700		195.000.000.000		178.000.000.000		188.000.000.000		198.000.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	-	3	765.187.700	3	195.000.000.000	1	178.000.000.000	2	188.000.000.000	2	198.000.000.000	103.0.00.0.00. 010000 -	
Persentase Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantab	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	83.85		11.000.000.000		15.500.000.000		18.000.000.000		20.000.000.000		22.000.000.000	103.0.00.0.00. 010002 -	
103.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota				11.000.000.000		15.500.000.000		18.000.000.000		20.000.000.000		22.000.000.000	103.0.00.0.00. 010002 -	
Terselenggaranya pemeliharaan jalan dan jembatan yang berkualitas	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	-	80	2.000.000.000	140	3.500.000.000	150	4.000.000.000	165	5.000.000.000	188	6.000.000.000	103.0.00.0.00. 010002 -	
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	-	6,2	9.000.000.000	7	12.000.000.000	8	14.000.000.000	9	15.000.000.000	10	16.000.000.000	103.0.00.0.00. 010002 -	
103.10.2.010051 - Pemeliharaan Rutin Jalan				9.000.000.000		12.000.000.000		14.000.000.000		15.000.000.000		16.000.000.000	103.0.00.0.00. 010002 -	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	-	6,2	9.000.000.000	7	12.000.000.000	8	14.000.000.000	9	15.000.000.000	10	16.000.000.000	103.0.00.0.00.010002 -	
103.10.2.010067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan				2.000.000.000		3.500.000.000		4.000.000.000		5.000.000.000		6.000.000.000	103.0.00.0.00.010002 -	
Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	-	80	2.000.000.000	140	3.500.000.000	150	4.000.000.000	165	5.000.000.000	188	6.000.000.000	103.0.00.0.00.010002 -	
103.11- PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		1145	25,4	2.424.978.880	35	2.675.000.000	45	2.675.000.000	55	2.675.000.000	65	2.675.000.000		
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang	3,09	12,94	2.199.978.880	15,61	2.450.000.000	18,27	2.450.000.000	20,93	2.450.000.000	23,60	2.450.000.000		
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	100	100	225.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
103.112.01- Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				2.000.000.800		2.100.000.000		2.100.000.000		2.100.000.000		2.100.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
Tersedianya dokumentasi kegiatan pelatihan dan Tercapainya Jumlah peserta yang dilatih (orang)	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan	500	400	1.750.000.000	500	1.800.000.000	500	1.800.000.000	500	1.800.000.000	500	1.800.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan	100	150	250.000.800	150	300.000.000	150	300.000.000	150	300.000.000	150	300.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
103.112.010011- Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi				250.000.800		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan	100	150	250.000.800	150	300.000.000	150	300.000.000	150	300.000.000	150	300.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
103.112.010016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				1.750.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan	500	400	1.750.000.000	500	1.800.000.000	500	1.800.000.000	500	1.800.000.000	500	1.800.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
103.112.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				199.978.080		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
Tersedianya Database Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi	2	3	199.978.080	3	350.000.000	3	350.000.000	3	350.000.000	3	350.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
103.112.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota				199.978.080		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi	2	3	199.978.080	3	350.000.000	3	350.000.000	3	350.000.000	3	350.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
103.112.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa				225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	
Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Jasa Konstruksi di Daerah	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	103.0.00.0.00.010000 -	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	-	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	103.0.00.0.00. 01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.112.04.0007 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	103.0.00.0.00. 01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	103.0.00.0.00. 01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.112.04.0010 - Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota				125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000	103.0.00.0.00. 01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	
Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	-	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	103.0.00.0.00. 01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	

TABEL 4.3.1 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

## PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

## DINAS PEKERJAAN UMUM PENDANAAN APBD

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	TARGET Tahun 2025											KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH (BIDANG)
				2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(2)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Terpadu dan berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum (Indeks)	%	58,40	61,68	796.770.527.981	64,65	888.571.301.000	67,84	1.192.521.195.000	71,26	1.256.910.981.000	74,11	1.326.014.497.000	74,11	5.349.988.501.981		Dinas Pekerjaan Umum
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
S1 : Meningkatnya Kinerja Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS	%	52,37%	52,60%	223.151.015.444	52,82%	263.462.500.000	53,03%	467.800.000.000	53,25%	429.200.066.150	53,46%	473.228.349.325	53,46%	1.744.841.930.919		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Bangunan SDA dalam Kondisi Baik	%	59,38%	60,94%	26.000.000.000	62,50%	131.062.500.000	64,06%	260.150.000.000	65,63%	273.050.066.150	67,19%	237.975.000.000	67,19%	928.237.566.150		Bidang SDA dan Drainase
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	14,88%	35,23%	8.853.640.000	53,41%	7.600.000.000	71,59%	10.600.000.000	89,77%	10.600.000.000	100,00%	6.100.000.000	100%	43.753.640.000		
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					26.000.000.000		131.062.500.000		260.150.000.000		273.050.066.150		237.975.000.000		928.237.566.150		
Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	Unit		-	-	1	32.812.500.000	-	-	1	35.437.500.000	-	-	2	68.250.000.000	APBD	
Pembangunan Pompa Banjir Tugu Adipura (pengadaan pompa)						1	31.250.000.000										
Supervisi Pembangunan Pompa Banjir Tugu Adipura							1.562.500.000										
Pembangunan Pompa Banjir Saluran Primer Klandasan Kecil										1	33.750.000.000						
Supervisi Pembangunan Pompa Banjir Saluran Primer Klandasan Kecil											1.687.500.000						
Pembangunan Pompa Bendati Wonorejo								1	25.000.000.000								
Supervisi Pembangunan Pompa Bendati Wonorejo									1.250.000.000								
Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang	Unit		0	-	3	750.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	6	5.250.000.000	APBD	
Alat Ukur Curah Hujan dan Pos Duga Air DAS Somber						1	250.000.000										
Alat Ukur Curah Hujan dan Pos Duga Air DAS Manggar																	
Alat Ukur Curah Hujan dan Pos Duga Air DAS Batakan Besar																	
Alat Ukur Curah Hujan dan Pos Duga Air DAS Manggar Kecil																	
Alat Ukur Curah Hujan dan Pos Duga Air DAS Selok Api																	
Alat Ukur Curah Hujan dan Pos Duga Air DAS Pandan Sari						1	250.000.000										
Alat Ukur Curah Hujan dan Pos Duga Air DAS Prapatan						1	250.000.000										
Aplikasi ANDROID Real-time Telemetry																	
Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) Kota Balikpapan								1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000				

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	TARGET Tahun 2025											KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH (BIDANG)
				2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(2)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	Unit						1	500.000.000					1	500.000.000	APBD	
Rehabilitasi Pompa Banjir Zurich		1						1	500.000.000								
Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi (UPTD)	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase		100,00%	3.500.000.000	100,00%	3.500.000.000	100,00%	3.500.000.000	100,00%	3.500.000.000	100,00%	3.500.000.000		17.500.000.000	APBD	UPTD Drainase dan Bozeem
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	KM		10	10.000.000.000	10	10.000.000.000	10	10.000.000.000	10	10.000.000.000	10	10.000.000.000	50	50.000.000.000	APBD	
Normalisasi/Restorasi Sungai Kota Balikpapan				10	10.000.000.000	10	10.000.000.000	10	10.000.000.000	10	10.000.000.000	10	10.000.000.000				
Peningkatan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan	Unit				1	10.100.000.000	1	15.100.000.000					2	25.200.000.000	APBD	
Bendali Wonorejo								1	15.100.000.000								
Bendali Kantor Lurah Gunung Bahagia						1	10.100.000.000										
Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan	Unit						3	2.100.000.000					3	2.100.000.000	APBD	
Bendali Wonorejo								1	300.000.000								
Bendali Telaga Sari								1	300.000.000								
Bozem Sepinggian								1	1.500.000.000								
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen		0	-	4	50.500.000.000	6	199.000.000.000	2	193.962.566.150	1	202.000.000.000	13	645.462.566.150	APBD	
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Bendali Sub DAS Posindo				0	-												
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendali Sub DAS Posindo								1	20.000.000.000								
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Normalisasi Sungai Ampal Segmen 4 (Jembatan Penegak-Jembatan Zurich)																	
Pengadaan Tanah untuk Normalisasi Sungai Ampal Segmen 4 (Jembatan Penegak-Jembatan Zurich)						1	50.000.000.000	1	50.000.000.000		93.962.566.150						
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Normalisasi Sungai Ampal Segmen 3 (Jembatan Penegak-Jembatan PDAM)						1	200.000.000										
Pengadaan Tanah untuk Normalisasi Sungai Ampal Segmen 3 (Jembatan Penegak-Jembatan PDAM)								1	50.000.000.000	1	50.000.000.000						
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Normalisasi Sungai Ampal Segmen 2 (Jembatan PDAM-Jembatan Jl. Mayor Pol. Zainal Arifin)						1	200.000.000										
Pengadaan Tanah untuk Normalisasi Sungai Ampal Segmen 2 (Jembatan PDAM-Jembatan Jl. Mayor Pol. Zainal Arifin)										1	50.000.000.000	1	202.000.000.000				
DED dan Kajian Lingkungan Pengaman Pantai Manggar																	
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Primer Klandasan Kecil						1	100.000.000										
Pengadaan Tanah untuk Primer Klandasan Kecil								1	52.000.000.000								
Pengadaan Tanah untuk Bendali Wonorejo								1	5.000.000.000								
Pengadaan Tanah untuk Bendali V								1	22.000.000.000								



Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	TARGET Tahun 2025											KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH (BIDANG)
				2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp		
(2)	(4)	(5)	(7)	Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)	Target (18)	Rp (19)	(20)	(21)
Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi	Unit		0	-	2	400.000.000	1	200.000.000	2	400.000.000	3	600.000.000	8	1.600.000.000	APBD	
Bendali Blok I										1	200.000.000						
Bendali Blok II												1	200.000.000				
Bendali Melawai II						1	200.000.000										
Bendali Gang Kantil												1	200.000.000				
Bendali Gunung Bahagia										1	200.000.000						
Bendali Telaga Sari												1	200.000.000				
Bendali Wonorejo						1	200.000.000										
Bozem Sepinggan								1	200.000.000								
Bozem Tugu Adipura				0	-												
Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Unit		0	-	1	10.500.000.000	1	15.750.000.000	1	15.750.000.000	1	7.875.000.000	4	49.875.000.000	APBD	
Bendali Empat Hulu																	
Supervisi Bendali Empat Hulu																	
Bendali Den Haag								1	15.000.000.000								
Supervisi Bendali Den Haag									750.000.000								
Bendali Perumdis						1	10.000.000.000										
Supervisi Bendali Perumdis							500.000.000										
Bendali Sub DAS Posindo										1	15.000.000.000						
Supervisi Bendali Sub DAS Posindo											750.000.000						
Bendali Sekunder Straat III Hulu												1	7.500.000.000				
Supervisi Bendali Sekunder Straat III Hulu													375.000.000				
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang disusun	Unit		1	12.500.000.000	1	12.500.000.000	1	12.500.000.000	1	12.500.000.000	1	12.500.000.000	1	62.500.000.000		
Pembebasan Lahan Segmen 4 Normalisasi Sungai Ampal					10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000				
Adminitrasi Pengadaan Tanah					2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000				
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					8.853.640.000		7.600.000.000		10.600.000.000		10.600.000.000		6.100.000.000		43.753.640.000		
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM		2	8.488.640.000		2.500.000.000		5.500.000.000		5.500.000.000		5.500.000.000	2	27.488.640.000	APBD	
Pembangunan D.I Gunung Binjai				2	-		2.500.000.000		5.500.000.000		5.500.000.000		5.500.000.000				
Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang	Bendung				1	5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000			1	15.000.000.000	APBD	
Peningkatan Bendung D.I Gunung Binjai						1	5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000						
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM										1	500.000.000	1	500.000.000	APBD	
Rehabilitasi D.I Gunung Binjai												1	500.000.000				
Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Lembaga		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	500.000.000	APBD	
Lembaga Komisi Irigasi Gunung Binjai				1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000				
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen		1	265.000.000									1	265.000.000	APBD	
DED Peningkatan Bendung D.I Gunung Binjai				1	265.000.000												

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	TARGET Tahun 2025											KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH (BIDANG)
				2026		2027		2028		2029		2030					
				Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)	Target (18)	Rp (19)		
(2)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	74,80%	75,64%	188.297.375.444	76,48%	124.800.000.000	77,31%	197.050.000.000	78,15%	145.550.000.000	78,98%	229.153.349.325	78,98%	772.850.724.769		Bidang SDA dan Drainase
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					188.297.375.444		124.800.000.000		197.050.000.000		145.550.000.000		229.153.349.325		772.850.724.769		
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Sistem Drainase		1500	22.398.032.414	1500	15.050.000.000	1500	15.050.000.000	1500	15.050.000.000	1500	15.050.000.000	7500	82.598.032.414	APBD	
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Kota Balikpapan				1.500	22.398.032.414	1.500	15.050.000.000	1.500	15.050.000.000	1.500	15.050.000.000	1.500	15.050.000.000				
Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase		1	31.832.914.030	1	15.050.000.000	1	15.050.000.000	1	15.050.000.000	1	15.050.000.000	5	92.032.914.030	APBD	
Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Kota Balikpapan				1	31.832.914.030	1	15.050.000.000	1	15.050.000.000	1	15.050.000.000	1	15.050.000.000				
Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase		5	81.098.633.000	2	42.000.000.000	4	73.500.000.000	4	63.000.000.000	2	141.750.000.000	5	401.348.633.000	APBD	
DAS PRIMER KLANDASAN KECIL				1		1		1		1							
Drainase Jl. A. Yani																	
Supervisi Drainase Jl. A. Yani																	
Drainase Jl. P. Antasari													130.000.000.000				
MK Drainase Jl. P. Antasari													6.500.000.000				
Drainase Jl. Mayjend Sutoyo									30.000.000.000								
Supervisi Drainase Jl. Mayjend Sutoyo									1.500.000.000								
Saluran Tersier Agus Salim											10.000.000.000						
Supervisi Saluran Tersier Agus Salim											500.000.000						
Primer Klandasan Kecil II							10.000.000.000										
Supervisi Primer Klandasan Kecil II							500.000.000										
DAS PRIMER AMPAL				1		1		1		1		1					
Saluran Sekunder Inhutani																	
Supervisi Saluran Sekunder Inhutani																	
Saluran Sekunder Balikpapan Baru											30.000.000.000						
Supervisi Saluran Sekunder Balikpapan Baru											1.500.000.000						
Saluran Tersier Wonorejo									20.000.000.000								
Supervisi Saluran Tersier Wonorejo									1.000.000.000								
Saluran Tersier Agung Tunggal							5.000.000.000										
Supervisi Saluran Tersier Agung Tunggal							250.000.000										
Drainase Jl. D.I Panjaitan																	
Supervisi Drainase Jl. D.I Panjaitan																	
Saluran Sekunder Straat III									10.000.000.000								
Supervisi Saluran Sekunder Straat III									500.000.000								
Saluran Sekunder Depsos Bawah																	
Supervisi Saluran Sekunder Depsos Bawah																	
Drainase Jl. MT. Haryono																	
Supervisi Drainase Jl. MT. Haryono																	
DAS PRIMER SEPINGGAN				1				1		1		1					
Saluran Sekunder Sepinggan Baru									10.000.000.000		10.000.000.000		5.000.000.000				
Supervisi Saluran Sekunder Sepinggan Baru									500.000.000		500.000.000		250.000.000				
Saluran Primer Sepinggan							20.000.000.000										
Supervisi Saluran Primer Sepinggan							1.000.000.000										
Drainase Jl. Abdi Praja VII							5.000.000.000										
Supervisi Drainase Jl. Abdi Praja VII							250.000.000										

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	TARGET Tahun 2025											KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH (BIDANG)
				2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(2)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
DAS PRIMER MANGGAR KECIL				1				1		1							
Saluran Tersier Martapura											5.000.000.000						
Supervisi Saluran Tersier Martapura											250.000.000						
Drainase Jl. Mulawarman																	
Supervisi Drainase Jl. Mulawarman																	
DAS PRIMER PANDAN SARI				1													
Drainase Jl. Pandan Arum											5.000.000.000						
Supervisi Drainase Jl. Pandan Arum											250.000.000						
Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya	Kawasan Genangan		1	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	400.000.000	APBD	
Penyusunan Outline Plan Kawasan Genangan Kota Balikpapan				1	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000				
Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase		1	5.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	13.000.000.000	APBD	
Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				1	5.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000				
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase			29.357.796.000		26.250.000.000		67.200.000.000		25.200.000.000		30.053.349.325	5	178.061.145.325	APBD	
DAS PRIMER AMPAL				1													
Saluran Tersier Beller							10.000.000.000										
Supervisi Saluran Tersier Beller							500.000.000										
Saluran Primer Strat III Hulu							10.000.000.000		25.000.000.000								
Supervisi Saluran Primer Strat III Hulu							500.000.000		1.250.000.000								
Saluran Sekunder RSU									3.500.000.000								
Supervisi Saluran Sekunder RSU									175.000.000								
Saluran Sekunder Guntur Damai											7.500.000.000						
Supervisi Saluran Sekunder Guntur Damai											375.000.000						
DAS PRIMER SEPINGGAN				1													
Saluran Tersier Balikpapan Regency									8.000.000.000								
Supervisi Saluran Tersier Balikpapan Regency									400.000.000								
DAS PRIMER SOMBER				1													
Saluran Primer Somber																	
Supervisi Saluran Primer Somber																	
Saluran Tersier At-Thoriq							5.000.000.000		10.000.000.000		5.000.000.000						
Supervisi Saluran Tersier At-Thoriq							250.000.000		500.000.000		250.000.000						
Saluran Tersier Perum POLDA 2									11.000.000.000		11.500.000.000		15.000.000.000				
Supervisi Saluran Tersier Perum POLDA 2									550.000.000		575.000.000		750.000.000				
DAS PRIMER MANGGAR BESAR																	
Saluran Sekunder Manggar 2																	
Supervisi Saluran Sekunder Manggar 2																	
DAS PRIMER BATAKAN BESAR				1													
Saluran Primer Batakan Besar																	
Supervisi Saluran Primer Batakan Besar																	
DAS PRIMER MANGGAR KECIL				1													
Saluran Primer Manggar Kecil													14.000.000.000				
Supervisi Saluran Primer Manggar Kecil													303.349.325				
DAS SEKUNDER TERITIP I				1													
Saluran Sekunder Teritip I									6.500.000.000								
Supervisi Saluran Sekunder Teritip I									325.000.000								

[illegible]

[illegible]

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	TARGET Tahun 2025											KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH (BIDANG)
				2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(2)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR		50	4.350.000.000	50	4.500.000.000	1.000	10.000.000.000	5.000	50.000.000.000	5.000	50.000.000.000	11100	118.850.000.000		
SPAM Jaringan Distribusi Jl. Malioboro Kelurahan Gunung Bahagia																	
Supervisi SPAM Jaringan Distribusi Jl. Malioboro Kelurahan Gunung Bahagia																	
SPAM Jaringan Distribusi Jl.Patok Merah Kelurahan Manggar																	
Supervisi SPAM Jaringan Distribusi Jl.Patok Merah Kelurahan Manggar																	
SPAM Ex. Kebakaran RT.09 Kel. Klandasan Ulu																	
Supervisi SPAM Ex. Kebakaran RT.09 Kel. Klandasan Ulu																	
SPAM Jaringan Perpipaan Sepaku-Semoi																	
Supervisi SPAM Jaringan Perpipaan Sepaku-Semoi																	
Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang	Unit		1	-	1	2.983.147.250	1	2.850.000.000	1	7.850.000.000	-	-		13.683.147.250		
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketercukupan Prasarana Pengelolaan Persampahan Regional	%	94,91	96,51	45.879.718.900	97,32	28.000.000.000	98,39	13.400.000.000	98,93	38.860.000.000	100,00	12.300.000.000	100,00	138.439.718.900		Bidang Penyehatan Lingkungan
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas PraSarana Persampahan				45.879.718.900		28.000.000.000		13.400.000.000		38.860.000.000		12.300.000.000	0,00%	138.439.718.900		
Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	Ton/hari			3.535.000.000		9.800.000.000		4.800.000.000		3.360.000.000		4.800.000.000		26.295.000.000		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang	Dokumen			350.000.000		6.400.000.000		2.300.000.000		400.000.000		1.200.000.000		10.650.000.000		
FS TPST Balikpapan Utara (Somber)		Dokumen															
Pembebasan Lahan TPST Balikpapan Utara (Somber)		Dokumen				1	3.000.000.000										
DED TPST Balikpapan Utara (Somber)		Dokumen						1	100.000.000								
Kajian Lingkungan TPST Balikpapan Utara (Somber)		Dokumen						1	900.000.000								
FS TPST Balikpapan Tengah		Dokumen															
Pembebasan Lahan TPST Balikpapan Tengah		Dokumen				1	3.000.000.000										
DED TPST Balikpapan Tengah		Dokumen						1	100.000.000								

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	TARGET Tahun 2025											KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH (BIDANG)
				2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(2)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Kajian Lingkungan TPST Balikpapan Tengah		Dokumen						1	900.000.000								
DED Peningkatan TPS se-Kota Balikpapan		Dokumen				1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000				
DED Peningkatan Landasan Kontainer se-Kota Balikpapan		Dokumen				1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000				
DED Pembangunan Rumah Kompos Pasar Buton		Dokumen															
DED Pembangunan Rumah Kompos Pasar Baru		Dokumen				1	100.000.000										
DED Pembangunan Rumah Kompos Pasar Sepinggian		Dokumen								1	100.000.000						
DED Pembangunan TPS3R Rusunawa se-Kota Balikpapan		Dokumen				1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000				
FS TPST Kel. Sepinggian Baru (Jl. Mukmin Faisyal)		Dokumen										1	900.000.000				
Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	Unit		0,00%	-		2.000.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		6.500.000.000		
Peningkatan TPS se-Kota Balikpapan		Unit				10	600.000.000	10	600.000.000	10	600.000.000	10	600.000.000				
Peningkatan Landasan Kontainer se-Kota Balikpapan		Unit				10	900.000.000	10	900.000.000	10	900.000.000	10	900.000.000				
Perbaikan handrail (pagar pengaman) IPAL Pasopati		Meter															
Perbaikan Sarana Eduwisata TPA Manggar		Unit															
Rehab Pagar Pembatas Lahan Sisi Utara TPA Manggar		Meter															
Rehab Area Workshop TPA Manggar		Unit															
Rehab Posko Kebersihan		Unit				1	500.000.000										
IPAL TPA																	
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Ton/hari				41.994.718.900	9.800.000.000		4.800.000.000		33.600.000.000		4.800.000.000		94.994.718.900		
Pembangunan TPST Balikpapan Timur		Ton/hari		5,00	15.000.000.000												
Pembangunan TPST Balikpapan Kota		Ton/hari		5,00	14.410.000.000												
Pembangunan TPST Balikpapan Utara (Somber)		Ton/hari								5,00	15.400.000.000						
Pembangunan TPST Balikpapan Tengah		Ton/hari								5,00	15.400.000.000						
Pembangunan Rumah Kompos TPST Pandansari		Ton/hari		1,00	2.000.000.000												
Pembangunan Gudang Limbah B3 di TPA Manggar		Ton/hari				1,00	5.000.000.000										
Pembangunan Pagar Pembatas Lahan Sisi Barat TPA Manggar		Meter		250,00	750.000.000												
Pembangunan Rumah Kompos Pasar Buton		Ton/hari				1,00	2.000.000.000										
Pembangunan Rumah Kompos Pasar Baru		Ton/hari						1,00	2.000.000.000								
Pembangunan Rumah Kompos Pasar Sepinggian		Ton/hari										1,00	2.000.000.000				
Pembangunan TPS3R Rusunawa se-Kota Balikpapan		Ton/hari		1,00	2.800.000.000	1,00	2.800.000.000	1,00	2.800.000.000	1,00	2.800.000.000	1,00	2.800.000.000				

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	TARGET Tahun 2025											KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH (BIDANG)
				2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(2)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman dan berkelanjutan (Persentase RT yang memiliki akses sanitasi aman)	%	11,31%	11,31%	10.025.000.000	12,61%	30.250.000.000	13,61%	20.221.091.250	14,61%	11.750.000.000	15,62%	95.560.000.000	15,62%	167.806.091.250		Bidang Penyehatan Lingkungan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					10.025.000.000		30.250.000.000		20.221.091.250		11.750.000.000		95.560.000.000	0,00%	167.806.091.250		
Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang	MÂ³/Hari		120	-										-		
Pembangunan IPLT Manggar		Unit		1	-												
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	MÂ³/Hari		1	1.025.000.000	18	9.800.000.000	18	1.600.000.000	18	3.400.000.000	18	5.200.000.000		21.025.000.000		
Pembangunan SPALDT Skala Permukiman		Unit		1	1.025.000.000	18	9.800.000.000	18	1.600.000.000	18	3.400.000.000	18	5.200.000.000				
Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	Unit		0,00%	-		1.000.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000		4.600.000.000		
Rehab Jaringan Eksisting IPAL Margasari		SR		0	-	65	1.000.000.000	65	1.100.000.000	65	1.200.000.000	65	1.300.000.000				
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	MÂ³/Hari					-		12.421.091.250		-		78.960.000.000		91.381.091.250		
Pembangunan Jaringan IPAL Somber		Meter														ZONA1 APBN, NON ZONA 1	
Pembangunan IPAL Somber		Unit														APBN	
Pembangunan Jaringan IPAL Sepinggian		Meter														ZONA1 APBN, NON ZONA 1	
Pembangunan IPAL Sepinggian		Unit														APBN	
Pembangunan Jaringan IPAL Margasari		Meter														ZONA1 APBN, NON ZONA 1	
Pembangunan IPAL Margasari		Unit														APBN	
Pembangunan Jaringan IPAL Balikpapan Tengah		Meter										1.600	8.960.000.000				
Pembangunan IPAL Balikpapan Tengah		Unit										1	70.000.000.000				
Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	Unit		0	-	3	900.000.000	2	650.000.000	3	1.050.000.000	2	750.000.000		3.350.000.000		
Rehabilitasi IPAL Komunal Kota Balikpapan		Unit		0	-	3	900.000.000	2	650.000.000	3	1.050.000.000	2	750.000.000				



[illegible]

[illegible]

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	TARGET Tahun 2025											KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH (BIDANG)
				2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(2)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Pembangunan Balikpapan Convention Center																APBD PROVINSI	
Pembangunan Gedung Smart City Center																DISKOMINFO	
MK Pembangunan Gedung Smart City Center																DISKOMINFO	
Pembangunan Gedung Kelurahan Klandasan Ulu							9.000.000.000										
Pembangunan Gedung Kantor BKPSDM							70.000.000.000										
MK Pembangunan Gedung Kantor BKPSDM							1.630.000.000										
Pembangunan Gedung Kantor DPU, DPPR, dan DISPERKIM									60.000.000.000								
Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan									65.000.000.000								
Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Muara Rapak									15.000.000.000								
Pembangunan Gedung Aula Kelurahan Baru Ulu											15.000.000.000						
Pembangunan Gedung Kelurahan Marga Sari											15.000.000.000						
Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Mekar Sari											15.000.000.000						
Pembangunan Gedung Depo Arsip Disputakar											40.000.000.000						
Peningkatan Gedung Aula Kantor Kelurahan Baru Ilir											15.000.000.000						
Pembangunan Gedung Serbaguna Kel. Karang Rejo											15.000.000.000						
Pembangunan Gedung Serbaguna Kel. Gunung Samarinda											15.000.000.000						
Pembangunan Gedung Kantor OPD Pemkot Balikpapan													136.000.000.000				
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen		300	1.325.000.000	350	1.400.000.000	400	1.470.000.000	450	1.543.500.000	500	1.620.675.000		7.359.175.000		

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	TARGET Tahun 2025											KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH (BIDANG)
				2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(2)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Pembangunan Balikpapan Convention Center																APBD PROVINSI	
S4: Meningkatnya kualitas infrastruktur Jalan dan jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	83,88	83,93	334.229.837.825	84,01	337.988.000.000	84,09	403.492.450.000	84,17	416.104.761.100	84,26	419.632.818.925	84,26	1.911.447.867.850		
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat konektivitas Jalan	%	84,73	84,89	334.229.837.825	85,43	337.988.000.000	85,92	403.492.450.000	86,41	416.104.761.100	86,90	419.632.818.925	86,90	1.911.447.867.850		
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					334.229.837.825		337.988.000.000		403.492.450.000		416.104.761.100		419.632.818.925		1.911.447.867.850		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen		10	31.000.000.000	10	2.400.000.000	10	2.568.000.000	10	2.747.760.000	10	2.940.103.200	50,00	41.655.863.200		
DED Pelebaran Jembatan Damai (Jalan MT. Haryono)				1	300.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		300.000.000		
Kajian dan Studi Kelayakan Jalan Tembus Jln Tembus Km8 Reservoir-Jln Mentarang				1	400.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		400.000.000		
Kajian dan Studi Kelayakan Jalan Tembus Jalan Mukmin Faisyal - Jalan Daksa				1	400.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		400.000.000		
Kajian dan Studi Kelayakan Jalan Tembus Jalan Mukmin Faisyal - Jalan Mentarang				1	400.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		400.000.000		
Kajian dan Studi Kelayakan Jalan Tembus Jalan Mukmin Faisyal - Jalan Pemuda				1	400.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		400.000.000		
Kajian dan Studi Kelayakan Jalan Akses Trans AD – Jalan Tembus Mukmin Faisyal Mulawarman				1	400.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		400.000.000		
Kajian dan Studi Kelayakan Jalan Trans AD III				1	400.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		400.000.000		
DED Jalan Tembus Jalan Gunung Binjai - Jalan KM. 23				1	400.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		400.000.000		
Kajian dan Studi Kelayakan Jalan Tembus Jalan Padat Karya II - Jalan Mufakat				1	400.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		400.000.000		
DED Rekonstruksi Jalan Tembus Jalan Traktor VI - Jalan Gunung Binjai				1	250.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		250.000.000		
Pembebasan Lahan Simpang Jalan Agung Tunggal-Jalan MT. Haryono				1	10.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		10.000.000.000		
Pembebasan Lahan Simpang Jalan Asnawi Arbain-Jalan MT. Haryono				1	10.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		10.000.000.000		
Pembebasan Lahan Jalan Letjend. Soeprapto				1	20.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		20.000.000.000		
Pembebasan Lahan Jalan Tembus SMPN 23 - Stadion				1	20.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		20.000.000.000		
Pembebasan Lahan Jembatan Somkar				1	20.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		20.000.000.000		
DED Pembangunan Jembatan RT. 37 Kel. Graha Indah				1	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		200.000.000		
DED Penggantian Jembatan Nur Eka				1	250.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		250.000.000		
DED Penggantian Jembatan Jalan Meranti KM. 12				1	250.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		250.000.000		
DED Jalan Tembus Jln Tembus Km8 Reservoir-Jln Mentarang				0	-	1	300.000.000	0	-	0	-	0	-		300.000.000		
DED Jalan Tembus Jalan Mukmin Faisyal - Jalan Daksa				0	-	1	300.000.000	0	-	0	-	0	-		300.000.000		
DED Jalan Tembus Jalan Mukmin Faisyal - Jalan Mentarang				0	-	1	300.000.000	0	-	0	-	0	-		300.000.000		
DED Jalan Tembus Jalan Mukmin Faisyal - Jalan Pemuda				0	-	1	300.000.000	0	-	0	-	0	-		300.000.000		
DED Jalan Akses Trans AD – Jalan Tembus Mukmin Faisyal Mulawarman				0	-	1	300.000.000	0	-	0	-	0	-		300.000.000		
DED Jalan Trans AD III				0	-	1	300.000.000	0	-	0	-	0	-		300.000.000		
DED Jalan Tembus Jalan Padat Karya II - Jalan Mufakat				0	-	1	300.000.000	0	-	0	-	0	-		300.000.000		
DED Pelebaran Jembatan Jalan Penegak				0	-	1	300.000.000	0	-	0	-	0	-		300.000.000		
DED Jalan dan Jembatan				0	-	0	-	10	2.568.000.000	10	2.747.760.000	10	2.940.103.200		8.255.863.200		

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	TARGET Tahun 2025											KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH (BIDANG)
				2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(2)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM		481,25	250.000.000	483,75	535.000.000	486,25	572.000.000	488,75	612.500.000	491,25	657.000.000	2431,23	2.626.500.000		
Penguatan database & survey kondisi jalan				481,25	300.000.000	483,75	321.000.000	486,25	343.000.000	488,75	367.500.000	491,25	395.000.000		1.726.500.000		
Penguatan database & survey kondisi jembatan					200.000.000		214.000.000		229.000.000		245.000.000		262.000.000		1.150.000.000		
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM		2,8	2.500.000.000	2,5	22.675.000.000	2,65	2.862.250.000	2,5	3.062.607.500	2,5	3.276.990.025	12,95	34.376.847.525		
Pembangunan Jalan Kota Balikpapan (Karya Bhakti TNI)				2,5	2.500.000.000	2,5	2.675.000.000	2,5	2.862.250.000	2,5	3.062.607.500	2,5	3.276.990.025		14.376.847.525		
Pembangunan Jalan Tembus Stadion-SMPN 23				0,3	20.000.000.000	0,15	20.000.000.000	0,15	-	0	-	0	-		40.000.000.000		
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM		10	76.021.779.027	10	26.964.000.000	10	28.851.480.000	10	30.871.083.600	10	33.032.059.200	50,00	195.740.401.827		
Rehabilitasi Jalan Kota Balikpapan					20.000.000.000		21.400.000.000		22.898.000.000		24.500.860.000		26.215.920.000		115.014.780.000		
Rehabilitasi Jalan																APBD PROVINSI	
DED Rehabilitasi Jalan					2.400.000.000		2.568.000.000		2.747.760.000		2.940.103.200		3.145.910.400		13.801.773.600		
Supervisi Rehabilitasi Jalan					2.800.000.000		2.996.000.000		3.205.720.000		3.430.120.400		3.670.228.800		16.102.069.200		
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM		10	80.402.146.848	10	80.464.000.000	10	86.098.720.000	10	92.123.010.000	10	98.575.720.500	50,00	437.663.597.348		
Pemeliharaan Jalan Kota Balikpapan Paket 1																APBD PROVINSI	
Pemeliharaan Jalan Kota Balikpapan Paket 2					20.000.000.000		21.400.000.000		22.898.000.000		24.500.860.000		26.215.920.000		115.014.780.000		
DED Peningkatan Jalan					2.400.000.000		2.568.000.000		2.750.000.000		2.940.000.000		3.150.000.000		13.808.000.000		
Supervisi Peningkatan Jalan					2.800.000.000		2.996.000.000		3.205.720.000		3.430.000.000		3.670.000.000		16.101.720.000		
Peningkatan Jalan					50.000.000.000		53.500.000.000		57.245.000.000		61.252.150.000		65.539.800.500		287.536.950.500		
Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	Jembatan		3	16.090.724.250	4	25.000.000.000	2	20.000.000.000	2	25.000.000.000	4	25.000.000.000	15,00	111.090.724.250		
Penggantian Jembatan Jalan Taman Sari				1	8.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		8.000.000.000		
Penggantian Jembatan RT. 12 Kel. Gunung Samarinda Baru				1	8.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		8.000.000.000		
Penggantian Jembatan Jalan Karya Bhakti				1	3.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		3.000.000.000		
Penggantian Jembatan Nur Eka				0	-	1	5.000.000.000	0	-	0	-	0	-		5.000.000.000		
Penggantian Jembatan Jalan Meranti KM. 12				0	-	1	10.000.000.000	0	-	0	-	0	-		10.000.000.000		
Penggantian Jembatan Jalan Tembus Jalan Gunung Binjai - Jalan Traktor VI				0	-	2	10.000.000.000	0	-	0	-	0	-		10.000.000.000		
Penggantian Jembatan Prapatan Dalam				0	-	0	-	1	10.000.000.000	0	-	0	-		10.000.000.000		
Penggantian Jembatan Kota Balikpapan				0	-	0	-	1	10.000.000.000	1	15.000.000.000	4	25.000.000.000		50.000.000.000		
Penggantian Jembatan Pandan Arum I				0	-	0	-	0	-	1	10.000.000.000	0	-		10.000.000.000		

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	TARGET Tahun 2025	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA										SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH (BIDANG)		
				2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(2)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Jembatan		2	7.150.000.000	3	7.000.000.000	3	7.490.000.000	3	8.014.300.000	3	8.575.301.000	14,00	38.229.601.000		
Rehabilitasi Jembatan PDAM				1	400.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		400.000.000		
Rehabilitasi Jembatan Kota Balikpapan				1	1.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		1.000.000.000		
Pembongkaran JPO Simpang Balikpapan Plaza					5.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		5.000.000.000		
Rehabilitasi Jembatan Kota Balikpapan				0	-	3	7.000.000.000	3	7.490.000.000	3	8.014.300.000	3	8.575.301.000		31.079.601.000		
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM		8	96.250.000.000	8	70.000.000.000	8	10.000.000.000	8	-	8	-	40,00	176.250.000.000		
Rekonstruksi Jalan Mukmin Faisyal				2,2	60.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		60.000.000.000	APBD PROVINSI	
Rekonstruksi Jalan Traktor VI				1,1	10.000.000.000	1,5		0	-	0	-	0	-		10.000.000.000	APBD PROVINSI	
Rekonstruksi Jalan Solok Lay				1,9	15.000.000.000	0	15.000.000.000	0	-	0	-	0	-		30.000.000.000		
Rekonstruksi Jalan Bambang Sutikno ( Alam Baru )				0,6	13.000.000.000	1		0	-	0	-	0	-		13.000.000.000	APBD PROVINSI	
Rekonstruksi Jalan Wonorejo				0,4	3.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		3.000.000.000		
Rekonstruksi Jalan Taman Sari				2,1	25.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		25.000.000.000		
Rekonstruksi Jalan Zainal Arifin				0,7	10.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		10.000.000.000		
Rekonstruksi Jalan Martapura				1,9	2.500.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		2.500.000.000		
Rekonstruksi Jalan Daksa Raya				1,1		0	15.000.000.000	0	-	0	-	0	-		15.000.000.000		
Peningkatan Trotoar dan Median Jalan MT. Haryono				1,4	10.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		10.000.000.000		
Peningkatan Trotoar dan Median Jalan A. Yani				3,6	25.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		25.000.000.000		
Peningkatan Median Jalan Mukmin Faisyal				7	15.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		15.000.000.000		
Peningkatan Jalan Graha Indah				1,5	10.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		10.000.000.000		
Peningkatan Jalan Indrakilla				0,8	10.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		10.000.000.000		
Rekonstruksi Jalan Gunung Binjai				0,7	5.000.000.000	1,4		0	-	0	-	0	-		5.000.000.000	APBD PROVINSI	
Rekonstruksi Jalan Ksatrian				3,7	45.000.000.000	0	15.000.000.000	0	-	0	-	0	-		60.000.000.000		
Rekonstruksi Jalan Tembus Mukmin Faisyal - Jalan Soekarno Hatta				0,8	10.000.000.000	0	-	0	10.000.000.000	0	-	0	-		20.000.000.000		
Rekonstruksi Jalan Samping Poltekba				0,5	5.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		5.000.000.000		
Rekonstruksi Jalan PDAM				0,6	5.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		5.000.000.000		
Rekonstruksi Jalan Sei Wain				0,5	5.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		5.000.000.000		
Peningkatan Median Jalan Letjend Soeprapto				2,3	5.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		5.000.000.000		
Pembuatan Trotoar Jalan 21 Januari				0,6	5.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		5.000.000.000		
Peningkatan Trotoar Jalan Ruhui Rahayu				0	-	1,3	10.000.000.000	0	-	0	-	0	-		10.000.000.000		
Rekonstruksi Jalan Tembus Km. 5,5-13				0	-		15.000.000.000	0	-	0	-	0	-		15.000.000.000		
Rekonstruksi Jalan Tembus Jalan Traktor VI - Jalan Gunung Binjai				0	-											APBD PROVINSI	
Rekonstruksi Jalan Mufakat Kel. Teritip				0	-											APBD PROVINSI	
Rekonstruksi Jalan Kota Balikpapan				0	-											APBD PROVINSI	

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	TARGET Tahun 2025											KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH (BIDANG)
				2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(2)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	KM		20	6.800.000.000	20	7.450.000.000	20	8.000.000.000	20	8.500.000.000	20	9.200.000.000	100,00	39.950.000.000		
Supervisi Jalan dan Jembatan				20	6.500.000.000	20	7.450.000.000	20	8.000.000.000	20	8.500.000.000	20	9.200.000.000		39.650.000.000		
Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	KM		2	6.000.000.000	1	15.000.000.000	1	16.050.000.000	1	17.173.500.000	1	18.375.645.000	6,00	72.599.145.000		
Pelebaran Simpang Jalan Agung Tunggal					10.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		10.000.000.000		
Pelebaran Jalan Indrakilla					10.000.000.000		15.000.000.000		16.050.000.000	0	-	0	-		41.050.000.000		
Pelebaran Simpang Jalan Asnawi Arbain - Jalan MT. Haryono					10.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		10.000.000.000		
Pelebaran Jalan Sepinggian Baru					5.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		5.000.000.000		
Pelebaran Simpang Dome dan Pembuatan Trotoar					10.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		10.000.000.000		
Pelebaran Jalan Simpang Rapak (Jalan Bulak)					10.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		10.000.000.000		
Pelebaran Bahu Jalan Soeprapto					5.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		5.000.000.000		
Pelebaran Jalan Kota Balikpapan				0	-	0	-	0	-		17.173.500.000		18.375.645.000		35.549.145.000		
Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan		3	765.187.700	3	35.000.000.000	1	178.000.000.000	2	188.000.000.000	2	198.000.000.000	11,00	599.765.187.700		
Pembangunan Jembatan Atas Air (Menuju TPI)				1	27.000.000.000	1	27.000.000.000	1	170.000.000.000	0	180.000.000.000	0	190.000.000.000		594.000.000.000		
Pembangunan Jembatan Somber-Kariangau				1		1		0	-	0	-	0	-		-		
Pembangunan Jembatan Penghubung Jalan Manuntung - Jalan Ruhui Rahayu 1				1	500.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		500.000.000		
Pembangunan Jembatan RT. 37 Kel. Graha Indah				0	-	1	8.000.000.000			0	-	0	-		8.000.000.000		
Pembangunan Jembatan Kota Balikpapan				0	-	0	-	1	8.000.000.000	1	8.000.000.000	1	8.000.000.000		24.000.000.000		
Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilebarkan	Jembatan		0	-	1	30.000.000.000	1	25.000.000.000	1	20.000.000.000	0	-	3,00	75.000.000.000		
Pelebaran Jembatan Damai (Jalan MT. Haryono)				0	-	1	30.000.000.000	0	-	0	-	0	-		30.000.000.000		
Pelebaran Jembatan Jalan Penegak				0	-	0	-	1	25.000.000.000	0	-	0	-		25.000.000.000		
Pelebaran Jembatan Beller I				0	-	0	-	0	-	1	20.000.000.000	0	-		20.000.000.000		
Pemeliharaan Rutin Jembatan (UPTD JJ)	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan		80	2.000.000.000	140	3.500.000.000	150	4.000.000.000	165	5.000.000.000	188	6.000.000.000		20.500.000.000		
Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD JJ)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara	KM		6,2	9.000.000.000	7,3	12.000.000.000	8,4	14.000.000.000	9	15.000.000.000	9,5	16.000.000.000	40,40	66.000.000.000		
S5 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Angka	13,98	25,40	2.424.978.880	35,00	2.675.000.000	45,00	2.675.000.000	55,00	2.675.000.000	65,00	2.675.000.000	65,00	13.124.978.880		
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%		12,94%	2.199.978.880	15,61%	2.450.000.000	18,27%	2.450.000.000	20,93%	2.450.000.000	23,60%	2.450.000.000		11.999.978.880	BIDANG BIKON	
	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi			100,00%	225.000.000	100,00%	225.000.000	100,00%	225.000.000	100,00%	225.000.000	100,00%	225.000.000		1.125.000.000		
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Presentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi				2.000.000.800		2.100.000.000		2.100.000.000		2.100.000.000		2.100.000.000		10.400.000.800		
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga		150	250.000.800	150	300.000.000	150	300.000.000	150	300.000.000	150	300.000.000		1.450.000.800		
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Orang		400	1.750.000.000	500	1.800.000.000	500	1.800.000.000	500	1.800.000.000	500	1.800.000.000		8.950.000.000		

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	TARGET Tahun 2025											KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH (BIDANG)
				2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(2)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					199.978.080		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		1.599.978.080		
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen		3	199.978.080	3	350.000.000	3	350.000.000	3	350.000.000	3	350.000.000		1.599.978.080		
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi					225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		1.125.000.000		
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Badan Usaha		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		500.000.000		
Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Dokumen		1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000		625.000.000		
NON URUSAN																	
S6: Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	83,28	80,00	34.369.976.932	80,05	41.082.653.750	80,10	40.337.653.750	80,15	40.592.653.750	80,20	40.597.653.750	80,20	198.180.591.932		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	80	81	34.369.976.932	82	41.082.653.750	83	40.337.653.750	84	40.592.653.750	85	40.597.653.750	85	198.180.591.932		SEKRETARIAT
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.	Nilai			319.820.820		375.000.000		375.000.000		375.000.000		375.000.000		1.819.820.820		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		2	319.820.820	2	375.000.000	2	375.000.000	2	375.000.000	2	375.000.000	10	1.819.820.820		
Administrasi KeuanganPerangkat Daerah					23.743.611.957		27.305.153.750		27.305.153.750		27.305.153.750		27.305.153.750		132.964.226.957		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		146	23.743.611.957	146	27.305.153.750	146	27.305.153.750	146	27.305.153.750	146	27.305.153.750	730	132.964.226.957		
Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah					780.000.000,00		1.150.000.000,00		1.150.000.000,00		1.150.000.000,00		1.150.000.000,00		5.380.000.000,00		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		146	-	146	300.000.000	146	300.000.000	146	300.000.000	146	300.000.000	730	1.200.000.000		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		150	780.000.000	150	850.000.000	150	850.000.000	150	850.000.000	150	850.000.000	750	4.180.000.000		



Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	TARGET Tahun 2025	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA										SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH (BIDANG)		
				2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(2)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.630.811.070,00		2.970.000.000,00		3.225.000.000,00		3.480.000.000,00		3.485.000.000,00		15.790.811.070,00		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		9	50.000.000	9	60.000.000	9	65.000.000	9	70.000.000	9	75.000.000	45	320.000.000		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		10	978.698.000	10	1.000.000.000	10	1.250.000.000	10	1.500.000.000	10	1.500.000.000	50	6.228.698.000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		10	650.000.000	10	700.000.000	10	700.000.000	10	700.000.000	10	700.000.000	50	3.450.000.000		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		8	175.000.000	8	200.000.000	8	200.000.000	8	200.000.000	8	200.000.000	40	975.000.000		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan FasilitasKunjungan Tamu	Laporan		425	50.000.000	430	60.000.000	435	60.000.000	440	60.000.000	445	60.000.000	2175	290.000.000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		50	627.113.070	50	750.000.000	50	750.000.000	50	750.000.000	50	750.000.000	250	3.627.113.070		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	500.000.000		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		1	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	400.000.000		
Pengadaan Barang Milik Daerah					1.621.066.200,00		3.650.000.000,00		2.650.000.000,00		2.650.000.000,00		2.650.000.000,00		13.221.066.200,00		
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit				1	1.000.000.000								1.000.000.000		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		7	1.621.066.200	2	1.850.000.000	2	1.850.000.000	2	1.850.000.000	2	1.850.000.000	15	9.021.066.200		
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit			-	1	-	1	-	1	-	1	-	4	-		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit			-	25	300.000.000	25	300.000.000	25	300.000.000	25	300.000.000	100	1.200.000.000		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			-	25,00	500.000.000	25,00	500.000.000	25,00	500.000.000	25,00	500.000.000	100,00	2.000.000.000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.392.235.735,00		3.500.000.000,00		3.500.000.000,00		3.500.000.000,00		3.500.000.000,00		17.392.235.735,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		5,00	1.472.392.000	5,00	1.500.000.000	5,00	1.500.000.000	5,00	1.500.000.000	5,00	1.500.000.000	25,00	7.472.392.000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		5,00	1.919.843.735	5,00	2.000.000.000	5,00	2.000.000.000	5,00	2.000.000.000	5,00	2.000.000.000	25,00	9.919.843.735		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah					1.882.431.150,00		2.132.500.000,00		2.132.500.000,00		2.132.500.000,00		2.132.500.000,00		10.412.431.150,00		
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		6,00	150.000.000	6,00	172.500.000	6,00	172.500.000	6,00	172.500.000	6,00	172.500.000	30,00	840.000.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		58,00	911.119.150	58,00	1.000.000.000	58,00	1.000.000.000	58,00	1.000.000.000	58,00	1.000.000.000	290,00	4.911.119.150		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		8,00	421.312.000	8,00	500.000.000	8,00	500.000.000	8,00	500.000.000	8,00	500.000.000	40,00	2.421.312.000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit		1,00	200.000.000	1,00	230.000.000	1,00	230.000.000	1,00	230.000.000	1,00	230.000.000	5,00	1.120.000.000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit		2,00	200.000.000	2,00	230.000.000	2,00	230.000.000	2,00	230.000.000	2,00	230.000.000	10,00	1.120.000.000		

TABEL 4.3.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

## PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

## DINAS PEKERJAAN UMUM PENDANAAN NON - APBD

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (BASELINE)	TARGET Tahun 2025											KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DPU		SUMBER DANA	PERANGKA T DAERAH (BIDANG)
					2026		2027		2028		2029		2030					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Terpadu dan berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum (Indeks)	%	57,59	58,40	61,68		64,65	1.285.300.652.750	67,84	1.324.989.708.750	71,26	1.075.883.203.850	74,11	1.056.981.251.175	74,11	4.743.154.816.525		Dinas Pekerjaan Umum
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
S1 : Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	52,15%	52,37%	52,60%		52,82%	479.485.000.000	53,03%	435.750.000.000	53,25%	300.687.433.850	53,46%	89.856.650.675	53,46%	1.305.779.084.525		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Bangunan SDA dalam Kondisi Baik	%	57,81%	59,38%	60,94%	-	62,50%	203.250.000.000	64,06%	273.000.000.000	65,63%	203.037.433.850	67,19%	-	67,19%	679.287.433.850		Bidang SDA dan Drainase
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	11,66%	14,88%	35,23%	-	53,41%	13.000.000.000	71,59%	-	89,77%	-	100,00%	-	100%	13.000.000.000		
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						-		203.250.000.000		273.000.000.000		203.037.433.850		-		679.287.433.850		
Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	Unit			-	-	2	26.250.000.000	-	-	1	-	-	-	3	26.250.000.000		
Pembangunan Pompa Banjir Tugu Adipura (pengadaan pompa)							1											
Supervisi Pembangunan Pompa Banjir Tugu Adipura																		
Pembangunan Pompa Banjir Saluran Primer Klandasan Kecil			52,73%								1							
Supervisi Pembangunan Pompa Banjir Saluran Primer Klandasan Kecil																		
Pembangunan Pompa Bendali Wonorejo							1	25.000.000.000										
Supervisi Pembangunan Pompa Bendali Wonorejo								1.250.000.000										
Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun	Unit			0	-	3	-	1		1		1		6	-		
Alat Ukur Curah Hujan dan Pos Duga Air DAS Somber							1											
Alat Ukur Curah Hujan dan Pos Duga Air DAS Manggar																		
Alat Ukur Curah Hujan dan Pos Duga Air DAS Batakan Besar																		
Alat Ukur Curah Hujan dan Pos Duga Air DAS Manggar Kecil																		
Alat Ukur Curah Hujan dan Pos Duga Air DAS Selok Api																		
Alat Ukur Curah Hujan dan Pos Duga Air DAS Pandan Sari							1											
Alat Ukur Curah Hujan dan Pos Duga Air DAS Prapatan							1											
Aplikasi ANDROID Real-time Telemetry																		
Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) Kota Balikpapan									1		1		1					

[illegible]

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (BASELINE)	TARGET Tahun 2025											KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DPU		SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH (BIDANG)
					2026		2027		2028		2029		2030					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi	Unit			0	-	2	-	1	-	2	-	3	-	8	-		
Bendali Blok I											1							
Bendali Blok II													1					
Bendali Melawai II							1											
Bendali Gang Kantil													1					
Bendali Gunung Bahagia											1							
Bendali Telaga Sari													1					
Bendali Wonorejo							1											
Bozem Sepinggan									1	-								
Bozem Tugu Adipura					0	-												
Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Unit			1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-		
Bendali Ampal Hulu					1	-												
Supervisi Bendali Ampal Hulu						-												
Bendali Den Haag																		
Supervisi Bendali Den Haag																		
Bendali Perumdis																		
Supervisi Bendali Perumdis																		
Bendali Sub DAS Posindo																		
Supervisi Bendali Sub DAS Posindo																		
Bendali Sekunder Straat III Hulu																		
Supervisi Bendali Sekunder Straat III Hulu																		
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang disusun	Unit			1		1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								13.000.000.000		-		-		-		13.000.000.000		
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM			2			3.000.000.000		0		0		0	2	3.000.000.000		
Pembangunan D.I Gunung Binjai					2			3.000.000.000										
Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	Bendung					1	10.000.000.000							1	10.000.000.000		
Peningkatan Bendung D.I Gunung Binjai							1	10.000.000.000										
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM											0	-	0	-		
Rehabilitasi D.I Gunung Binjai																		
Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Lembaga			1		1	-	0	-	0	-	0	-	1	-		
Lembaga Komisi Irigasi Gunung Binjai					1		1											
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen			1										1	-		
DED Peningkatan Bendung D.I Gunung Binjai					1													

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (BASELINE)	TARGET Tahun 2025											KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DPU		SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH (BIDANG)
					2026		2027		2028		2029		2030					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	73,97%	74,80%	75,64%		76,48%	263.235.000.000	77,31%	162.750.000.000	78,15%	97.650.000.000	78,98%	89.856.650.675	78,98%	613.491.650.675		Bidang SDA dan Drainase
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota								263.235.000.000		162.750.000.000		97.650.000.000		89.856.650.675		613.491.650.675		
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Sistem Drainase			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Kota Balikpapan																		
Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Kota Balikpapan																		
Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase			4		2	142.485.000.000	3	78.750.000.000	3	21.000.000.000	2	35.910.000.000	5	278.145.000.000		
DAS PRIMER KLANDASAN KECIL					1		1		1		1							
Drainase Jl. A. Yani								20.000.000.000		45.000.000.000							APBD PROVINSI	
Supervisi Drainase Jl. A. Yani								1.000.000.000		2.250.000.000								
Drainase Jl. P. Antasari																	APBD PROVINSI	
MK Drainase Jl. P. Antasari																		
Drainase Jl. Mayjend Sutoyo																		
Supervisi Drainase Jl. Mayjend Sutoyo																		
Saluran Tersier Agus Salim																		
Supervisi Saluran Tersier Agus Salim																		
Primer Klandasan Kecil II																		
Supervisi Primer Klandasan Kecil II																		
DAS PRIMER AMPAL					1		1		1		1		1					
Saluran Sekunder Inhutani																		
Supervisi Saluran Sekunder Inhutani																		
Saluran Sekunder Balikpapan Baru								30.000.000.000		30.000.000.000				27.200.000.000				
Supervisi Saluran Sekunder Balikpapan Baru								1.500.000.000		1.500.000.000				1.360.000.000				
Saluran Tersier Wonorejo								20.000.000.000										
Supervisi Saluran Tersier Wonorejo								1.000.000.000										
Saluran Tersier Agung Tunggal																		
Supervisi Saluran Tersier Agung Tunggal																		
Drainase Jl. D.I Panjaitan																		
Supervisi Drainase Jl. D.I Panjaitan																		
Saluran Sekunder Straat III																		
Supervisi Saluran Sekunder Straat III																		
Saluran Sekunder Depsos Bawah								15.700.000.000										
Supervisi Saluran Sekunder Depsos Bawah								785.000.000										
Drainase Jl. MT. Haryono								50.000.000.000										
Supervisi Drainase Jl. MT. Haryono								2.500.000.000										
DAS PRIMER SEPINGGAN					1				1		1		1					
Saluran Sekunder Sepinggan Baru																		
Supervisi Saluran Sekunder Sepinggan Baru																		
Saluran Primer Sepinggan																		
Supervisi Saluran Primer Sepinggan																		
Drainase Jl. Abdi Praja VII																		
Supervisi Drainase Jl. Abdi Praja VII																		
DAS PRIMER MANGGAR KECIL																		
Saluran Tersier Martapura																		
Supervisi Saluran Tersier Martapura																		
Drainase Jl. Mulawarman											20.000.000.000		7.000.000.000					
Supervisi Drainase Jl. Mulawarman											1.000.000.000		350.000.000					
DAS PRIMER PANDAN SARI					1													
Drainase Jl. Pandan Arum																		
Supervisi Drainase Jl. Pandan Arum																		
Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya	Kawasan Genangan			1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-		
Penyusunan Outline Plan Kawasan Genangan Kota Balikpapan					1													
Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase			1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-		
Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan					1													

[illegible]



Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (BASELINE)	TARGET Tahun 2025											KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DPU		SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH (BIDANG)
					2026		2027		2028		2029		2030					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit			0	-	1		1,00	5.300.000.000	1		1			5.300.000.000	+sumur esdm	
Jaringan Perpipaan Sumur Dalam Kel. Sepinggan																		
Supervisi Jaringan Perpipaan Sumur Dalam Kel. Sepinggan																		
SPAM Jaringan Distribusi Alam Baru Sombor																		
Supervisi SPAM Jaringan Distribusi Alam Baru Sombor																		
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR			50		50	-	15.000	184.700.000.000	15.000	150.000.000.000	19.000	350.000.000.000		684.700.000.000		
SPAM Jaringan Distribusi Jl. Malioboro Kelurahan Gunung Bahagia																		
Supervisi SPAM Jaringan Distribusi Jl. Malioboro Kelurahan Gunung Bahagia																		
SPAM Jaringan Distribusi Jl. Patok Merah Kelurahan Manggar																		
Supervisi SPAM Jaringan Distribusi Jl. Patok Merah Kelurahan Manggar																		
SPAM Ex. Kebakaran RT.09 Kel. Klandasan Ulu																		
Supervisi SPAM Ex. Kebakaran RT.09 Kel. Klandasan Ulu																		
SPAM Jaringan Perpipaan Sepaku-Semoi																		
Supervisi SPAM Jaringan Perpipaan Sepaku-Semoi			5272,50%															
Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit			1	-	1	4.866.852.750	1	5.000.000.000	1		-	-		9.866.852.750		
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketercukupan Prasarana Pengelolaan Persampahan Regional	%	94,37	94,91	96,51		97,32	-	98,39	-	98,93	30.240.000.000	100,00	-	100,00	30.240.000.000		Bidang Kesehatan Lingkungan
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas PraSarana Persampahan							-		-		30.240.000.000		-	0,00%	30.240.000.000		
Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	Ton/hari										30.240.000.000				30.240.000.000		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Dokumen						-		-						-		
FS TPST Balikpapan Utara (Sombor)		Dokumen																
Pembebasan Lahan TPST Balikpapan Utara (Sombor)		Dokumen					1											
DED TPST Balikpapan Utara (Sombor)		Dokumen																
Kajian Lingkungan TPST Balikpapan Utara (Sombor)		Dokumen																
FS TPST Balikpapan Tengah		Dokumen																
Pembebasan Lahan TPST Balikpapan Tengah		Dokumen					1											
DED TPST Balikpapan Tengah		Dokumen																
Kajian Lingkungan TPST Balikpapan Tengah		Dokumen																
DED Peningkatan TPS se-Kota Balikpapan		Dokumen					1											
DED Peningkatan Landasan Kontainer se-Kota Balikpapan		Dokumen					1											
DED Pembangunan Rumah Kompos Pasar Buton		Dokumen																
DED Pembangunan Rumah Kompos Pasar Baru		Dokumen					1											
DED Pembangunan Rumah Kompos Pasar Sepinggan		Dokumen																
DED Pembangunan TPS3R Rusunawa se-Kota Balikpapan		Dokumen					1											
FS TPST Kel. Sepinggan Baru (Jl. Mukmin Faisval)		Dokumen																



Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (BASELINE)	TARGET Tahun 2025											KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DPU		SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH (BIDANG)
					2026		2027		2028		2029		2030					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang dioptimalisasi	Unit			0,00%	-										-		
Peningkatan TPS se-Kota Balikpapan		Unit																
Peningkatan Landasan Kontainer se-Kota Balikpapan		Unit																
Perbaikan handrail (pagar pengaman) IPAL Pandanari		Meter																
Perbaikan Sarana Eduwisata TPA Manggar		Unit																
Rehab Pagar Pembatas Lahan Sisi Utara TPA Manggar		Meter																
Rehab Area Workshop TPA Manggar		Unit																
Rehab Posko Kebersihan IPAL TPA		Unit																
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang dibangun	Ton/hari					-			-		-		-		-		
Pembangunan TPST Balikpapan Timur		Ton/hari			5,00													
Pembangunan TPST Balikpapan Kota		Ton/hari			5,00													
Pembangunan TPST Balikpapan Utara (Somber)		Ton/hari									5,00							
Pembangunan TPST Balikpapan Tengah		Ton/hari									5,00							
Pembangunan Rumah Kompos TPST Pandansari		Ton/hari			1,00													
Pembangunan Gudang Limbah B3 di TPA Manggar		Ton/hari																
Pembangunan Pagar Pembatas Lahan Sisi Barat TPA Manggar		Meter			250,00													
Pembangunan Rumah Kompos Pasar Buton		Ton/hari																
Pembangunan Rumah Kompos Pasar Baru		Ton/hari																
Pembangunan Rumah Kompos Pasar Sepinggán		Ton/hari																
Pembangunan TPS3R Rusunawa se-Kota Balikpapan		Ton/hari			1,00													
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman dan berkelanjutan (Persentase RT yang memiliki akses sanitasi aman)	%	11,08%	11,31%	11,31%		12,61%	172.148.800.000	13,61%	360.647.708.750	14,61%	251.951.620.000	15,62%	462.284.800.000	15,62%	1.247.032.928.750		Bidang Penyehtatan Lingkungan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								172.148.800.000		360.647.708.750		251.951.620.000		462.284.800.000	0,00%	1.247.032.928.750		
Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan	MA <sup>3</sup> /Hari			120	-										-		
Pembangunan IPLT Manggar		Unit			1	-												
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	MA <sup>3</sup> /Hari			1		18	10.000.000.000	18	20.000.000.000	18	20.000.000.000	18	20.000.000.000		70.000.000.000		
Pembangunan SPALDT Skala Permukiman		Unit			1		18	10.000.000.000	18	20.000.000.000	18	20.000.000.000	18	20.000.000.000				
Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	Unit			0,00%											-		
Rehab Jaringan Eksisting IPAL Margasari		SR			0													





Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (BASELINE)	TARGET Tahun 2025											KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DPU		SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH (BIDANG)
					2026		2027		2028		2029		2030					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Pembangunan Gedung Kelurahan Klandasan Ulu																		
Pembangunan Gedung Kantor BKPSDM																		
MK Pembangunan Gedung Kantor BKPSDM																		
Pembangunan Gedung Kantor DPU, DPRD, dan DISPERKIM																		
Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan																		
Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Muara Rapak																		
Pembangunan Gedung Aula Kelurahan Baru Utu																		
Pembangunan Gedung Kelurahan Marga Sari																		
Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Mekar Sari																		
Pembangunan Gedung Depo Arsip Disputakar																		
Peningkatan Gedung Aula Kantor Kelurahan Baru Ilir																		
Pembangunan Gedung Serbaguna Kel. Karang Rejo																		
Pembangunan Gedung Serbaguna Kel. Gunung Samarinda																		
Pembangunan Gedung Kantor OPD Pemkot Balikpapan																		
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen			300											-		
S4: Meningkatnya kualitas infrastruktur Jalan dan jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	83,85	83,88	83,93		84,01	255.600.000.000	84,09	141.592.000.000	84,17	183.004.150.000	84,26	154.839.800.500	84,26	735.035.950.500		
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat konektivitas Jalan	%	84,34	84,73	84,89		85,43	255.600.000.000	85,92	141.592.000.000	86,41	183.004.150.000	86,90	154.839.800.500	86,90	735.035.950.500		
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota								255.600.000.000		141.592.000.000		183.004.150.000		154.839.800.500		735.035.950.500		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen			10		10	-	10	-	10	-	10	-	50,00	-		
DED Pelebaran Jembatan Damai (Jalan MT. Haryono)					1		0		0	-	0	-	0	-		-		
Kajian dan Studi Kelayakan Jalan Tembus Jln Tembus Km8 Reservoir-Jln Mentarang					1		0		0	-	0	-	0	-		-		
Kajian dan Studi Kelayakan Jalan Tembus Jalan Mukmin Faisyal - Jalan Daksa					1		0		0	-	0	-	0	-		-		
Kajian dan Studi Kelayakan Jalan Tembus Jalan Mukmin Faisyal - Jalan Mentarang					1		0		0	-	0	-	0	-		-		
Kajian dan Studi Kelayakan Jalan Tembus Jalan Mukmin Faisyal - Jalan Pemuda					1		0		0	-	0	-	0	-		-		
Kajian dan Studi Kelayakan Jalan Akses Trans AD – Jalan Tembus Mukmin Faisyal Mulawarman					1		0		0	-	0	-	0	-		-		
Kajian dan Studi Kelayakan Jalan Trans AD III					1		0		0	-	0	-	0	-		-		
DED Jalan Tembus Jalan Gunung Binjai - Jalan KM. 23					1		0		0	-	0	-	0	-		-		
Kajian dan Studi Kelayakan Jalan Tembus Jalan Padat Karya II - Jalan Mufakat					1		0		0	-	0	-	0	-		-		

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (BASELINE)	TARGET Tahun 2025											KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DPU		SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH (BIDANG)
					2026		2027		2028		2029		2030					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
DED Rekonstruksi Jalan Tembus Jalan Traktor VI - Jalan Gunung Binjai					1		0		0	-	0	-	0	-		-		
Pembebasan Lahan Simpang Jalan Agung Tunggal- Jalan MT. Haryono					1		0		0	-	0	-	0	-		-		
Pembebasan Lahan Simpang Jalan Asnawi Arbain- Jalan MT. Haryono					1		0		0	-	0	-	0	-		-		
Pembebasan Lahan Jalan Letjend. Soeprapto					1		0		0	-	0	-	0	-		-		
Pembebasan Lahan Jalan Tembus SMPN 23 - Stadion					1		0		0	-	0	-	0	-		-		
Pembebasan Lahan Jembatan Somkar					1		0		0	-	0	-	0	-		-		
DED Pembangunan Jembatan RT. 37 Kel. Graha Indah					1		0		0	-	0	-	0	-		-		
DED Penggantian Jembatan Nur Eka					1		0		0	-	0	-	0	-		-		
DED Penggantian Jembatan Jalan Meranti KM. 12					1		0		0	-	0	-	0	-		-		
DED Jalan Tembus Jln Tembus Km8 Reservoar-Jln Mentarang					0		1		0	-	0	-	0	-		-		
DED Jalan Tembus Jalan Mukmin Faisyal - Jalan Daksa					0		1		0	-	0	-	0	-		-		
DED Jalan Tembus Jalan Mukmin Faisyal - Jalan Mentarang					0		1		0	-	0	-	0	-		-		
DED Jalan Tembus Jalan Mukmin Faisyal - Jalan Pemuda					0		1		0	-	0	-	0	-		-		
DED Jalan Akses Trans AD – Jalan Tembus Mukmin Faisyal Mulawarman					0		1		0	-	0	-	0	-		-		
DED Jalan Trans AD III					0		1		0	-	0	-	0	-		-		
DED Jalan Tembus Jalan Padat Karya II - Jalan Mufakat					0		1		0	-	0	-	0	-		-		
DED Pelebaran Jembatan Jalan Penegak					0		1		0	-	0	-	0	-		-		
DED Jalan dan Jembatan					0		0		10	-	10	-	10	-		-		
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM			481,25		483,75	-	486,25	-	488,75	-	491,25	-	2431,23	-		
Penguatan database & survey kondisi jalan					481,25		483,75		486,25		488,75		491,25			-		
Penguatan database & survey kondisi jembatan																-		
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM			2,8		2,8	-	2,5	-	2,5	-	2,5	-	13,10	-		
Pembangunan Jalan Kota Balikpapan (Karya Bhakti TNI)					2,5		2,5		2,5		2,5		2,5			-		
Pembangunan Jalan Tembus Stadion-SMPN 23					0,3		0,3		0		0		0			-		
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM			10		10	53.500.000.000	10	57.245.000.000	10	61.252.150.000	10	65.539.800.500	50,00	237.536.950.500		
Rehabilitasi Jalan Kota Balikpapan																		
Rehabilitasi Jalan								53.500.000.000		57.245.000.000		61.252.150.000		65.539.800.500		237.536.950.500	APBD PROVINSI	
DED Rehabilitasi Jalan																		
Supervisi Rehabilitasi Jalan																		
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM			10		10	32.100.000.000	10	34.347.000.000	10	36.752.000.000	10	39.300.000.000	50,00	142.499.000.000		
Pemeliharaan Jalan Kota Balikpapan Paket 1								32.100.000.000		34.347.000.000		36.752.000.000		39.300.000.000		142.499.000.000	APBD PROVINSI	
Pemeliharaan Jalan Kota Balikpapan Paket 2																		
DED Peningkatan Jalan																		
Supervisi Peningkatan Jalan																		
Peningkatan Jalan																-		
Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	Jembatan			3		4	-	2	-	2	-	4	-	15,00	-		
Penggantian Jembatan Jalan Taman Sari					1		0		0		0		0			-		
Penggantian Jembatan RT. 12 Kel. Gunung Samarinda Baru					1		0		0		0		0			-		
Penggantian Jembatan Jalan Karya Bhakti					1		0		0		0		0			-		
Penggantian Jembatan Nur Eka					0		1		0		0		0			-		
Penggantian Jembatan Jalan Meranti KM. 12					0		1		0		0		0			-		
Penggantian Jembatan Jalan Tembus Jalan Gunung Binjai - Jalan Traktor VI					0		2		0		0		0			-		
Penggantian Jembatan Prapatan Dalam					0		0		1		0		0			-		
Penggantian Jembatan Kota Balikpapan					0		0		1		1		4			-		
Penggantian Jembatan Pandan Arum I					0		0		0		1		0			-		

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (BASELINE)	TARGET Tahun 2025											KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DPU		SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH (BIDANG)
					2026		2027		2028		2029		2030					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Jembatan			2		3	-	3	-	3	-	3	-	14,00	-		
Rehabilitasi Jembatan PDAM					1		0		0		0		0			-		
Rehabilitasi Jembatan Kota Balikpapan					1		0		0		0		0			-		
Pembongkaran JPO Simpang Balikpapan Plaza							0		0		0		0			-		
Rehabilitasi Jembatan Kota Balikpapan					0		3		3		3		3			-		
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM			8		8	10.000.000.000	8	50.000.000.000	8	85.000.000.000	8	50.000.000.000	40,00	195.000.000.000		
Rekonstruksi Jalan Mukmin Faisyal					2,2		0	-	0	-	0	-	0	-		-		
Rekonstruksi Jalan Traktor VI					1,1		1,5		0	-	0	-	0	-		-		
Rekonstruksi Jalan Solok Lay																		
Rekonstruksi Jalan Bambang Sutikno ( Alam Baru )					0,6		1		0	-	0	-	0	-		-		
Rekonstruksi Jalan Wonorejo																		
Rekonstruksi Jalan Taman Sari																		
Rekonstruksi Jalan Zainal Arifin																		
Rekonstruksi Jalan Martapura																		
Rekonstruksi Jalan Daksa Raya																		
Peningkatan Trotoar dan Median Jalan MT. Haryono																		
Peningkatan Trotoar dan Median Jalan A. Yani																		
Peningkatan Median Jalan Mukmin Faisyal																		
Peningkatan Jalan Graha Indah																		
Peningkatan Jalan Indrakilla																		
Rekonstruksi Jalan Gunung Binjai					0,7		1,4	10.000.000.000	0	-	0	-	0	-		10.000.000.000		
Rekonstruksi Jalan Ksatrian																		
Rekonstruksi Jalan Tembus Mukmin Faisyal - Jalan Soekarno Hatta																		
Rekonstruksi Jalan Samping Poltekba																		
Rekonstruksi Jalan PDAM																		
Rekonstruksi Jalan Sei Wain																		
Peningkatan Median Jalan Letjend Soeprapto																		
Pembuatan Trotoar Jalan 21 Januari																		
Peningkatan Trotoar Jalan Ruhui Rahayu					0					-	0	-	0	-		-		
Rekonstruksi Jalan Tembus Km. 5,5-13					0					-	0	-	0	-		-		
Rekonstruksi Jalan Tembus Jalan Traktor VI - Jalan Gunung Binjai					0		1,7		2,7	25.000.000.000	0	-	0	-		25.000.000.000		
Rekonstruksi Jalan Mufakat Kel. Teritip					0		0	-	3,3	25.000.000.000	3	35.000.000.000	0	-		60.000.000.000		
Rekonstruksi Jalan Kota Balikpapan					0		0	-	0	-		50.000.000.000		50.000.000.000		100.000.000.000		
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	KM			0		0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-		
Supervisi Jalan dan Jembatan																		
Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	KM			2		1	-	1	-	1		1	-	6,00	-		
Pelebaran Simpang Jalan Agung Tunggal							0	-	0	-	0	-	0	-		-		
Pelebaran Jalan Indrakilla											0	-	0	-		-		
Pelebaran Simpang Jalan Asnawi Arbain - Jalan MT. Haryono							0	-	0	-	0	-	0	-		-		
Pelebaran Jalan Sepinggah Baru							0	-	0	-	0	-	0	-		-		
Pelebaran Simpang Dome dan Pembuatan Trotoar							0	-	0	-	0	-	0	-		-		
Pelebaran Jalan Simpang Rapak (Jalan Bulak)							0	-	0	-	0	-	0	-		-		
Pelebaran Bahu Jalan Soeprapto							0	-	0	-	0	-	0	-		-		
Pelebaran Jalan Kota Balikpapan							0	-	0	-						-		







**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS**  
**PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA**  
**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM</b>				
1.	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meringkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Pestorasi Sungai 1.03.02.2.01.0097 - Peningkatan Polder/Kolam Retensi 1.03.02.2.01.0123 - Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi 1.03.02.2.01.0124 - Pembangunan Polder/Kolam Retensi 1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.03.02.2.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 1.03.02.2.02.0048 - Peningkatan Bendung Irigasi	
2.	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meringkatnya akses aman masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.03.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 1.03.03.2.01.0026 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1.03.03.2.01.0031 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1.03.03.2.01.0033 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	
3.	1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meringkatnya layanan persampahan regional	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.04.2.01.0013 - Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 1.03.04.2.01.0016 - Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	
4.	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meringkatnya akses aman masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.03.05.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 1.03.05.2.01.0024 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan 1.03.05.2.01.0025 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan 1.03.05.2.01.0029 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 1.03.05.2.01.0032 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat	
5.	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meringkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 1.03.06.2.01.0021 - Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.03.05.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	
			1.03.05.2.01.0027 - Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	
			1.03.05.2.01.0028 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
			1.03.05.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
			1.03.05.2.01.0030 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	
6.	1.03.05 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	1.03.05.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan <u>Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</u>	
			1.03.05.2.01.0017 - Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.05.2.01.0021 - Pembangunan, Pemertasaan, Pelesterian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.05.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Perseizinan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SBKBG	
7.	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
			1.03.10.2.01.0049 - pelebaran Jembatan	
			1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan	
			1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan	
			1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan	
			1.03.10.2.01.0057 - Penggantian Jembatan	
			1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan	
			1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan	
8.	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
			1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
			1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
			1.03.11.2.04.0007 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	

#### 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama ( IKU) Perangkat Daerah

Sebagai alat ukur kuantitatif untuk melihat dampak dari pelaksanaan yang telah dilaksanakan, serta memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja kepala pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan maka akan memuat target tahunan sebagai indikator kinerja utama yaitu:

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD**  
**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM									
2.	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	Indeks	57,59	58,4	61,68	64,65	67,84	71,26	74,11	
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	79,58	79,85	80	80,05	80,1	80,15	80,2	
4.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabi/Kota	%	52,15	52,37	52,6	52,82	53,03	53,25	53,46	
5.	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Nilai	11,45	13,98	25,4	35	45	55	65	
6.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	94,39	94,41	94,45	94,49	95,56	98,21	99,81	
7.	Persentase Infrastruktur Sanitasi dalam Kondisi Aman dan Berkelanjutan	%	52,73	53,11	53,91	54,97	56	56,77	57,81	
8.	Persentase Bangunan Gedung yang Layak Fungsi	%	56,69	56,81	56,96	57,1	57,26	57,45	57,65	
9.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	83,85	83,88	83,93	84,01	84,09	84,17	84,26	

#### 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci ( IKK)

Setiap indikator dilengkapi dengan target tahunan yang terukur, mulai dari tahun 2025 hingga 2029, untuk menggambarkan progres pencapaian secara bertahap. Target ini disusun guna mendorong pelaksanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan, efektif, dan adaptif terhadap dinamika perubahan. Melalui penetapan IKU dan target lima tahunan ini. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. IKK memiliki fungsi penting dalam memastikan bahwa seluruh pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan berjalan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, serta mampu memberikan dampak terhadap meningkatnya infrastruktur di Kota Balikpapan. Dengan menggunakan IKK, BPBD Kota Balikpapan dapat menilai efektivitas intervensi kebijakan dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan. Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan disajikan dalam tabel berikut:

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI**  
**RANCANGAN AKHIR RENSTRA**  
**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
2.	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	positif	Indeks	57,59	58,4	61,68	64,65	67,84	71,26	74,11	
3.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	positif	%	94,39	94,41	94,45	94,49	95,56	98,21	99,81	
4.	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	positif	Nilai	11,45	13,98	25,4	35	45	55	65	
5.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	positif	Nilai	79,58	79,85	80	80,05	80,1	80,15	80,2	
6.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/kota	positif	%	52,15	52,37	52,6	52,82	53,03	53,25	53,46	
7.	Persentase Infrastruktur Sanitasi dalam Kondisi Aman dan Berkelanjutan	positif	%	52,73	53,11	53,91	54,97	56	56,77	57,81	
8.	Persentase Bangunan Gedung yang Layak Fungsi	positif	%	56,69	56,81	56,96	57,1	57,26	57,45	57,65	
9.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	positif	%	83,85	83,88	83,93	84,01	84,09	84,17	84,26	
10.	Persentase Kepatuhan PBG Kabupaten/kota	positif	%	90	90	90	90,84	91,51	92,05	92,48	
11.	Persentase Bangunan SDA dalam Kondisi Baik	positif	%	57,81	59,38	60,94	62,5	64,06	65,63	67,19	
12.	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	positif	%	73,97	74,8	75,64	76,48	77,31	78,15	78,98	
13.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	positif	Nilai	78	80	81	82	83	84	85	
14.	Persentase Ketercukupan Prasarana Pengelolaan Persampahan Regional	positif	%	94,37	94,91	96,51	97,32	98,39	98,93	100	
15.	Persentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
16.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	positif	%	81,63	81,64	81,67	81,7	82,75	85,39	86,98	
17.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Aman dan Berkelanjutan	positif	%	11,08	11,31	11,31	12,61	13,61	14,61	15,62	
18.	Tingkat Konektivitas Jalan	positif	%	84,34	84,73	84,89	85,43	85,92	86,41	86,9	
19.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	positif	%	3,09	3,09	12,94	15,61	18,27	20,93	23,6	
20.	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	positif	%	11,66	14,88	35,23	53,41	71,59	89,77	100	
21.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		%	95,99	96,5	97	97,5	98	98,5	99	
22.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	positif	%	90	90	90	90,84	91,51	92,05	92,48	
23.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	positif	Orang	11,08	11,31	11,31	12,61	13,61	14,61	15,62	
24.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	positif	Orang	94,39	94,41	94,45	94,49	95,55	98,21	99,81	
25.	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar: (a) akses layanan air minum; (b) akses layanan sanitasi layak; dan (c) akses fasilitas kesehatan dasar	positif	%	52,73	52,86	52,88	53,55	54,58	56,41	57,71	

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tahun 2025-2029 merupakan arahan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum di Kota Balikpapan yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, atau antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Pemerintah Propinsi atau Pusat, ataupun dengan Dunia Usaha. Upaya ini ditujukan agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan urusan pekerjaan perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal. Melalui penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum, permukiman, dapat berjalan secara efisien dan ramah lingkungan. Dengan melaksanakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan 2025-2029 secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dengan sebaik-baiknya, diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan yang lebih baik.

## D. DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

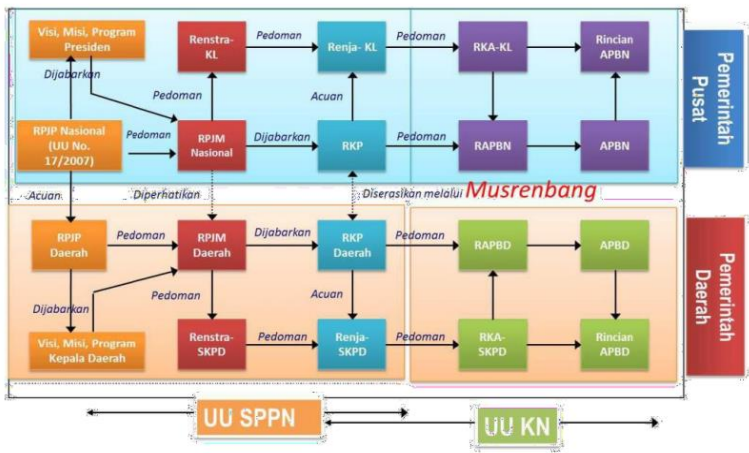
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membuat dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selain itu berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272, dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 pasal 13 bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Dengan demikian, maka setiap Perangkat Daerah perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan sektoralnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk jangka waktu 5 tahun tersebut.

Rancangan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 memperhatikan implementasi tahapan I (2025-2029) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2045. Arah kebijakan pembangunan daerah Tahap 1 RPJPD Kota Balikpapan adalah “Penguatan Transformasi” dengan tema ”Balikpapan Kota Cerdas dan Kolaboratif”. Tema tersebut berupaya untuk melakukan peningkatan kualitas hukum dan demokrasi, peningkatan layanan perkotaan terpadu berbasis teknologi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung perekonomian serta memperkuat sinergi antara perencanaan dan penganggaran dengan memperhatikan aspek tata ruang sebagai modal

Pembangunan berkelanjutan, kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

Dalam menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Balikpapan.



Gambar 1.1 Posisi Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan

Sumber: UU SPPN dan UU Keuangan Negara

Pembangunan di sektor perumahan dan permukiman yang meliputi bidang perumahan, infrastruktur atau sarana prasarana utilitas umum perumahan dan permukiman, serta kawasan permukiman memiliki peran

penting dalam pembangunan di Kota Balikpapan. Selama ini, pelaksanaan pembangunan di sektor perumahan dan permukiman telah diselenggarakan melalui berbagai program dan kegiatan yang memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat baik masyarakat secara umum maupun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, dalam beberapa hal, penyelenggaraan dan hasil yang diharapkan masih belum optimal sehingga diperlukan perencanaan yang lebih matang dalam menyelesaikan berbagai persoalan pada urusan perumahan dan kawasan permukiman.

Tantangan pembangunan Kota Balikpapan ke depan sangatlah dinamis, adanya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan tahapan pertama dari RPJPN 2025-2045 sesuai Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024, maka Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan harus mempunyai perencanaan yang baik untuk mendukung prioritas nasional pada sektor perumahan, yaitu:

**a. Mendukung Asta Cita nomor 3,6,8**

- (3) "Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, Dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur";
- (6) "Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan";
- (8). "Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan Makmur

- ❖ **Program Prioritas nomor 13** "Menjamin Rumah Murah Dan Sanitasi Untuk Masyarakat Desa Dan Rakyat Yang Membutuhkan".
- ❖ **Program Hasil Terbaik Cepat Nomor 7** "Menyediakan Rumah Murah Layak Huni, Memiliki Sanitasi Dan Fasilitas Umum Yang Baik Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr) Seperti Tni Dan Polri Berpangkat Rendah, Asn, Pegawai Kementerian Dan Bumn, Dan Pekerja Informal Seperti Pedagang Bakso, Pedagang Sayur, Driver Gojek Dan Lainnya"
- ❖ **Sasaran 2** "Meningkatnya Akses Hunian Layak, Terjangkau, Dan Berkelanjutan" Meningkat dari 65,25% (2024) menjadi 67% (2025) dan 74%



(2029)". Tempat Tinggal Yang Layak Dan Terjangkau Merupakan Hak Dasar Setiap Warga Negara. Pemerintah Harus Hadir Memberikan Rumah Yang Murah Dan Sanitasi Yang Baik Bagi Masyarakat Yang Membutuhkan.

- ❖ **Kegiatan Prioritas Utama Nomor 74** "Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi Dengan PSU dan Program 3 Juta Rumah " dengan target berupa pembangunan dan renovasi yang meliputi 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di perdesaan, dan 1 juta rumah di pesisir.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043, bahwa kecenderungan pertumbuhan dan perkembangan perumahan di Kota Balikpapan semakin meningkat melihat Kota Balikpapan sebagai Kota Penyangga Ibu Kota Negara (IKN), dimana sebagai bagian dari tiga kota dalam rangka mendukung IKN sebagai Superhub Ekonomi serta pintu gerbang utama menuju IKN. Dalam kerangka pengembangan IKN, Kota Balikpapan diarahkan untuk pengembangan industri khususnya industri farmasi, industri petrokimia, dan industri masa depan berbasis energi terbarukan juga mempengaruhi kualitas kawasan permukiman, sehingga mendukung konsep penataan ruang "**Kota Hijau (Green City)** " yaitu konsep pembangunan kota berkelanjutan dan ramah lingkungan yang dicapai dengan strategi pembangunan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kehidupan sosial dan perlindungan lingkungan sehingga kota menjadi tempat yang layak huni tidak hanya bagi generasi sekarang, namun juga generasi berikutnya. Untuk itu Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, harus menyusun suatu rencana pembangunan strategis 5 tahun ke depan untuk mewujudkan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundangan yang melatar belakangi penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang KlasifikasiKodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1419);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 08 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 06 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
  20. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  21. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
  22. Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Nomor / / Disperkim Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2025-2029;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yaitu memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman perencanaan strategis dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan urusan bidang Perumahan dan kawasan permukiman tahun 2025-2029 yang efektif dan efisien untuk mendorong peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman Kota Balikpapan dalam mewujudkan hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan Kota Balikpapan.
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kota Balikpapan;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan;

### **1.3.2 Tujuan**

Adapun Tujuan dari Penyusunan Dokumen Renstra Dinas Perumahan

dan Permukiman Kota Balikpapan yaitu :

1. Memberikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan sektor perumahan dan permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diterapkan selama lima tahun ke depan.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
3. Perencanaan strategis tersebut sebagai dasar perencanaan tahunan, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana kerja selama periode 2025-2029 sehingga di harapkan dapat menghasilkan perencanaan yang andal, transparan dan akuntabel..
4. Mengarahkan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan berbagai sektor terkait untuk secara bersama mewujudkan tujuan pembangunan Kota Balikpapan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan Dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang**

Memuat secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra Dina Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dengan RPJMD, Renstra Kementerian Perumahan dan Permukiman, Renstra PUPR Provinsi Kalimantan Timur serta dengan Renja.

#### **I.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas fungsi, kewenangan Dina Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan penganggaran.

### **I.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dina Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

### **I.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **2.1 Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

#### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

#### **2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Menjelaskan tentang sumber daya yang dimiliki ukan, struktur organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan. Kota Balikpapan dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia dan aset/modal.

#### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Menjelaskan tingkat capaian kinerja Kota Balikpapan berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan dan/atau indikator lainnya.

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah**

### **2.2 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

#### **2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

#### **2.2.2 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan dan selanjutnya menjelaskan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

### **BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah dan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dalam lima tahun mendatang.

#### **3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

#### **3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

#### **3.3 Strategis Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

#### **3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

### **BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Bab IV paling sedikit memuat:

#### **4.1 Program Perangkat Daerah**

#### **4.2 Kegiatan Perangkat Daerah**

#### **4.3 Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah**

#### **4.4 Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

#### **4.5 Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah**

#### **4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).**

### **BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

**BAB II**  
**GAMBAR PELAYANAN , PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS**  
**PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN**

**2.1 Gambaran Perangkat Daerah**

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan merupakan salah satu unsur Pemerintah Daerah (PD) Kota Balikpapan yang berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022, maka Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan melaksanakan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi urusan bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan pemakaman. Secara nomenklatur masih membunyikan bidang pertamanan dan pemakaman namun tidak menangani urusan pertamanan dan pemakaman, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Sinkronisasi Pekerjaan Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian Nomor 600/0105/BappedaLitbang-PIPP tanggal 22 Februari tahun 2021 diputuskan bidang pertamanan dan pemakaman yang mengelola ruang terbuka hijau (taman dan makam) beralih ke perangkat daerah yang menangani urusan lingkungan hidup.

**2.1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022, maka Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan pemakaman;
- b. penyusunan rancangan kebijakan pencegahan timbulnya permukiman kumuh;
- c. penyusunan rancangan kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh;
- d. pengoordinasian penataan prasarana, sarana dan utilitas dipermukiman khususnya di kawasan pembangunan perumahan;
- e. pengembangan dan penyebaran sistem informasi dan komunikasi perumahan dan permukiman;
- f. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan pemakaman;
- g. perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian teknis dan pembinaan di bidang perumahan dan permukiman yang meliputi pembiayaan, pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan;
- h. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman;
- i. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengendalian pemberian layanan konsultasi dan rekomendasi bidang perumahan dan permukiman;
- j. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- k. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- l. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- m. pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;



- n. penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
- o. pelaksanaan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
- p. pembinaan sertifikasi dan registrasi kepada orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas;
- q. pembinaan dan pengendalian UPTD;
- r. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **A. SEKRETARIAT**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian:

- a. penyusunan program;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. kepegawaian;
- d. rumah tangga kantor;
- e. perlengkapan;
- f. protokol;
- g. hubungan masyarakat;
- h. layanan informasi dan pengaduan;
- i. pembinaan pelayanan publik;
- j. kearsipan;
- k. surat menyurat; dan
- l. evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran dinas dan penerimaan Dinas;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

- j. pembinaan dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik;
- k. pengelolaan survei kepuasan masyarakat;
- l. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- m. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksana;
- n. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
- o. pengoordinasian bidang dan UPTD;
- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat terdiri atas:

1. Subbagian Umum, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- g. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- i. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- j. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- k. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- n. memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
- o. mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
- p. menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;

- q. memfasilitasi pembinaan tatakelola pelayanan publik;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
  - 1) rencana strategis;
  - 2) rencana kerja;
  - 3) rencana kerja tahunan;
  - 4) penetapan kinerja; dan
  - 5) laporan kinerja;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. mengoordinasikan pembangunan, pengembangan pemeliharaan aplikasi dengan bidang;
- f. melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas bidang;
- g. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- i. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- j. mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran /dokumen pelaksanaan anggaran;
- k. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- l. melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
- m. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- n. mengoordinir dan meneliti anggaran;
- o. menyusun laporan keuangan Dinas;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **B. BIDANG PERUMAHAN**

Bidang Perumahan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perumahan.

Bidang Perumahan melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan program dan kegiatan di Bidang Perumahan;
- b. pelaksanaan pendataan, pengawasan dan pengendalian penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;
- c. pelaksanaan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;
- d. pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;
- e. pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Daerah;
- f. penyusunan dan pengumpulan data bahan evaluasi dan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan atau rumah khusus;

- g. pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan rumah susun umum atau rumah khusus;
- h. pelaksanaan proses rekomendasi rencana tapak pembangunan dan pengembangan perumahan;
- i. penyediaan data, informasi dan kajian mengenai penerbitan izin pembangunan dan pengembangan rumah;
- j. pengoordinasian layanan izin pembangunan dan pengembangan perumahan
- k. melaksanakan persiapan teknis untuk bahan penerbitan sertifikat hak milik satuan rumah susun dan pelaksanaan proses penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
- l. pelaksanaan pembinaan sertifikasi dan registrasi kepada orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah tingkat kemampuan kecil;
- m. pelaksanaan fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik;
- n. perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. BIDANG PERMUKIMAN**

Bidang Permukiman mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Permukiman.

Bidang Permukiman melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan program kerja di Bidang Permukiman;
- b. pelaksanaan perencanaan, bimbingan dan bantuan teknis penataan kawasan kumuh dan rawan bencana di permukiman;
- c. pelaksanaan survei dan penelitian penataan kawasan kumuh dan rawan bencana di permukiman;
- d. pelaksanaan evaluasi, pengkajian dan pengarahan penataan permukiman kumuh dan rawan bencana di permukiman;
- e. pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- f. penyusunan dan penyiapan data bahan evaluasi dan pengembangan penataan permukiman kumuh dan rawan bencana di Permukiman;
- g. pengaturan penataan bangunan di kawasan kumuh dan rawan bencana, sarana prasarana dan fasilitas lingkungan;
- h. penyusunan data dan informasi kebijakan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- i. pelaksanaan survei lapangan dalam rangka analisis kesesuaian pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- j. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan permukiman;
- k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman untuk menjamin pencegahan permukiman kumuh dan pembangunan permukiman yang layak huni, sehat, aman, serasi dan teratur;
- l. pengoordinasian layanan administrasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**D. BIDANG PERTAMANAN DAN PERMAKAMAN**

Bidang Pertamanan dan Permakaman mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Pertamanan dan Permakaman.

Bidang Pertamanan dan Permakaman mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan program kerja di Bidang Pertamanan dan Permakaman;
- b. penyusunan pedoman operasional perencanaan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, penyediaan prasarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian, dan kerja sama penyediaan/pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman;
- c. penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
- d. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- e. pelaksanaan kerja sama penyediaan/pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman.
- f. pelaksanaan verifikasi dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman dari pengembang;
- g. pelaksanaan fasilitasi penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat;
- h. pelaksanaan fasilitasi pembentukan tim verifikasi penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**E. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Subbagian Umum; dan
  - 2. Subbagian Program dan Keuangan;
- c. Bidang Perumahan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Permukiman, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pertamanan dan Permakaman, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPTD.

Gambar 2.1

**Bagan Struktur Organisasi**

I. SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah berbagai aset yang dimiliki pemerintah Kota Balikpapan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yaitu sumber daya manusia dan sumber daya aset.

2.1.3 Sumber Daya Manusia

Keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tidak terlepas dari peran aktif dari SDM Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan yang saling berkoordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan untuk secara bersama-sama mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Adapun dukungan SDM aparatur Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan berdasarkan keadaan Agustus 2025 sebanyak 37 orang, dengan klasifikasi berdasarkan pangkat, golongan, jenjang pendidikan, eselon dan gender sebagaimana dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

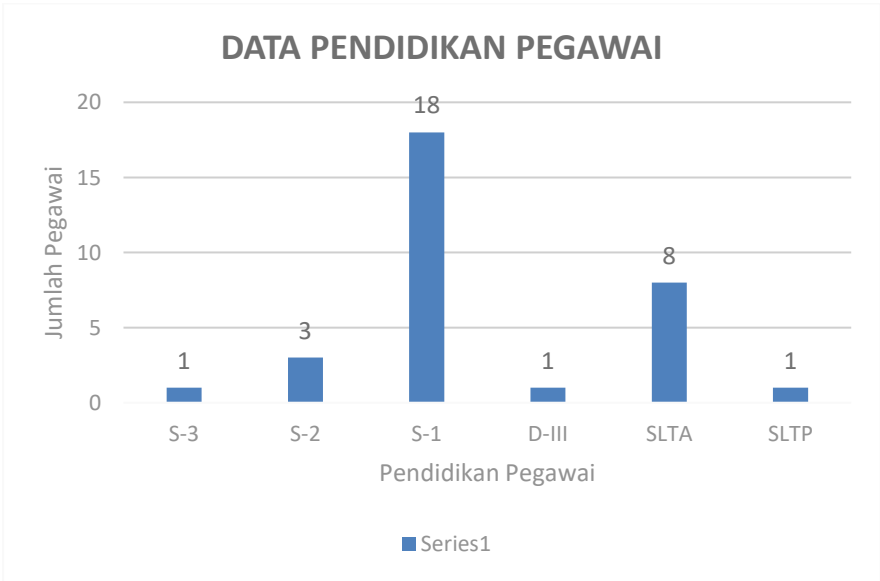
**Tabel 2.1**  
**Jumlah ASN Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Berdasarkan Pangkat**

NO	PANGKAT/ GOL RUANG									PRIA	WANITA
	Keterangan	IV.c	IV.a	III.d	III.b	III.a	II.d	II.c	PPPK		
1	Pembina Utama Muda / (IV/c)	1								1	
2	Pembina / (IV/a)		3							1	2

NO	PANGKAT/ GOL RUANG									PRIA	WANITA
	Keterangan	IV.c	IV.a	III.d	III.b	III.a	II.d	II.c	PPPK		
4	Penata Tingkat I (III/d)			6						2	4
5	Penata / (III/b)				2					1	1
6	Penata Muda / (II/a)					10				5	5
7	Pengatur Tingkat I / (II/d)						2			1	1
8	Pengatur / (II/c)							2		1	1
10	PPPK (IX)								10	7	3
	Jumlah	1	3	6	2	10	2	2	10	19	17

Sumber : Bagian Umum Disperkim Kota Balikpapan

Dari tabel 2.1 diketahui bahwa tahun 2025 jumlah pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan berdasarkan **Golongan** menunjukkan bahwa jumlah tertinggi pegawai golongan III sebanyak 21 orang.



Grafik 2.1  
Data Pendidikan

Pada tahun 2025 jumlah pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan berdasarkan **Tingkat Pendidikan** menunjukkan bahwa jumlah tertinggi pegawai dengan Pendidikan S1 sebanyak 18 orang.

2.1.4 Sasaran dan Prasarana Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

Sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati dalam hubungan langsung dengan pelayanan kepegawaian yang diberikan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, baik itu perlengkapan, peralatan, kendaraan operasional pelayanan, jaringan komunikasi, tempat duduk tamu, dan sarana pendukung pelayanan lainnya harus memadai dan sesuai standar pelayanan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa urusan perumahan dan kawasan permukiman.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Daftar Barang Tahun 2025

No	NAMA BARANG		JUMLAH
	Tanah		
	-	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	32.883 m²
	-	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.800 m²
	-	Tanah Kampung	
2	Peralatan dan Mesin		
	-	Dump Truck	
	-	Truck Crane	
	-	Portable Water Pump	
	-	Mesin Bor Lainnya (dst)	
	-	Station Wagon	1
	-	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1
	-	Truck + Attachment	
	-	Pick Up	3
	-	Sepeda Motor	23
	-	Mobil Jenazah	
	-	Mobil Tangki Air	
	-	Gerobak Dorong	
	-	Kapal Terbang Lainnya (dst)	2
	-	Mesin Kompresor	
	-	Mesin Las Listrik	
	-	Mesin Pemotong Plat	
	-	Gergaji Chain Saw	
	-	Bak Air	



No		NAMA BARANG	JUMLAH
	-	Palu	
	-	Perkakas Bengkel Kerja Lainnya (bor Listrik)	1
	-	Global Positioning System	1
	-	Alat Ukur Lain-lain Lainnya (dst)	1
	-	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	
	-	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	
	-	Rak-rak Penyimpan	1
	-	Alat Pengasapan	
	-	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1
	-	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1
	-	Lemari Besi/Metal	2
	-	Lemari Kayu	4
	-	Rak Besi	6
	-	Rak Kayu	3
	-	Filing Cabinet Besi	5
	-	Brandkas	2
	-	Lemari Kaca	2
	-	CCTV- Camera Control Television System	1
	-	Papan Visual/Papan Nama	1
	-	White Board	1
	-	Alat Penghancur Kertas	1
	-	Mesin Absensi	1
	-	Alat Pengaman Sinyal	1
	-	Papan Nama Instansi	1
	-	Papan Pengumuman	25
	-	Alat Kantor Lainnya	3
	-	Meja Kerja Kayu	
	-	Kursi Besi/Metal	2
	-	Kursi Kayu	1
	-	Meja Rapat	3
	-	Meja Resepsionis	4
	-	Meja Tambahan	
	-	Meja ½ Biro	2
	-	Kursi Rapat	50
	-	Kursi Tamu	1
	-	Kursi Putar	41
	-	Kursi Biasa	7
	-	Bangku Tunggu	1
	-	Kursi Lipat	

No		NAMA BARANG	JUMLAH
	-	Meja Komputer	
	-	Sofa	5
	-	Meubeleur Lainnya	1
	-	Alat Pengukur Waktu Lainnya	1
	-	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1
	-	Mesin Pemotong Rumput	4
	-	A.C. Window	
	-	A.C. Split	15
	-	Kipas Angin	
	-	Televisi	6
	-	Sound System	4
	-	Alat Hiasan	1
	-	Tangga Alumunium	2
	-	Dispenser	2
	-	Gordyin/Kray	23
	-	Alat Rumah Tangga Lain-lain	12
	-	Alat Pemadam/Portable	3
	-	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1
	-	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2
	-	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	40
	-	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	2
	-	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	2
	-	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	7
	-	Uniterruptible Power Supply (UPS)	
	-	Peralatan Studio Audio Lainnya (dst)	13
	-	Camera digital	2
	-	Photo Tustel	
	-	Layar Film/Projector	1
	-	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	1
	-	Telephone (PABX)	1
	-	Pesawat Telephone	1
	-	Handy Talky (HT)	11
	-	Faccsimile	1
	-	Alat Komunikasi Radio hf/fm Lainnya (dst)	1
	-	Alat Komunikasi Radio uhf Lainnya (dst)	1
	-	Baby Incubator (Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan)	
	-	Alat Kedokteran tht Lainnya (dst)	
	-	Stabilizer	

No		NAMA BARANG	JUMLAH
	-	Peralatan Pencampur Kompos & Bio Stabilizer	
	-	Distiling Apparatus	
	-	Meja Kerja	2
	-	Safety Can	
	-	Generator Set (Lab Scale)	
	-	Alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst)	
	-	Alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa lanjutan lainnya (dst)	
	-	Scanner (Assembly/counting System)	1
	-	Generator Set (Lab Scale)	
	-	Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran)	
	-	Mainframe (Komputer Jaringan)	1
	-	P.C Unit	17
	-	Laptop	15
	-	Note Book	3
	-	Printer (Peralatan Personal Komputer)	25
	-	Peralatan Personal Komputer lainnya	24
	-	Tenda	
	-	Rambu Bersuar Lainnya (dst)	
	-	Rambu Papan Tambahan	
3		Gedung dan Bangunan	
	-	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1
	-	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	
	-	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	
	-	Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen	
	-	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	
	-	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	
	-	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst)	
	-	Gedung Pos Jaga Permanen	
	-	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	
	-	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	
	-	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	1
	-	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	
	-	Taman Lainnya	
	-	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	
	-	Flat/Rumah Susun Permanen	15
	-	Flat/rumah Lain-lain (dst)	24

No		NAMA BARANG	JUMLAH
	-	Tugu Pembangunan	
	-	Tugu Peringatan Lainnya	
	-	Makam Bersejarah	
	-	Tugu/Tanda Batas Lain-lain (dst)	
	-	Pagar Permanen	
	-	Tugu/tanda batas lainnya	
4		Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	-	Jalan Kabupaten Lokal	
	-	Jalan Kabupaten Lain-lain	7
	-	Jalan Desa	6
	-	Jalan Desa Lain-lain	3
	-	Jalan Khusus Lainnya	4
	-	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri	
	-	Jembatan Kabupaten/kota Lain-lain	
	-	Jembatan Penyebrangan Lain-lain	
	-	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	
	-	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain	
	-	Saluran Penyimpan Air	
	-	Saluran Drainage	
	-	Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan	
	-	Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain	
	-	Bangunan Buster Pump	
	-	Sumur Gali (SGL)	
	-	Sumur Resapan	1
	-	Instalasi Air Kotor Lain-lain	
	-	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	1
	-	Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain	7
	-	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 1 KVA	2
	-	Jaringan Distribusi Lain-lain	11
	-	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	1
	-	Jaringan telepon lainnya	1
5		Aset Tetap Lainnya	
	-	Buku Umum Lain-lain	
	-	Hukum	
	-	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	
	-	Tanaman Keras	
	-	Tanaman Holtikultura	

No	NAMA BARANG		JUMLAH
6	Konstruksi dalam Pengerjaan		
	-	Bangunan Gedung Kantor Permanen	
	-	Gedung Pos Jaga Permanen	
	-	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	
	-	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	
	-	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	
	-	Taman lainnya	
	-	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	
	-	Flat/Rumah Susun Permanen	
	-	Pagar Permanen	
	-	Tugu/tanda batas lainnya	
	-	Jalan Kabupaten Lokal	
	-	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri	
	-	Jembatan Kabupaten/kota Lain-lain	1
	-	Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan	
	-	Instalasi Air Kotor Lain-lain	

2.1.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dijelaskan tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan periode 2022-2024 baik pencapaian kinerja anggaran maupun realisasi pendanaan pelayanan.

a. Capaian Kinerja Pelayanan Pembangunan Perumahan Dan Permukiman dalam RPJMD Kota Balikpapan

Secara umum, capaian kinerja pembangunan bidang perumahan dan permukiman tercermin di dalam indikator kinerja daerah RPJMD 2022-2024 Dinas perumahan dan permukiman, seperti yang bisa dilihat pada **tabel 2.3** berikut ini.

Tabel 2.3

Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Perumahan Dan Permukiman dalam Indikator Kinerja Daerah Rpjmd 2022-2024 Dinas perumahan dan permukiman Kota Balikpapan

No	Aspek/fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
----	--	--------	--------------------	--------------------	--------------------

1	Persentase Permukiman Layak Huni	%	99,07	99,11	99,85
---	----------------------------------	---	-------	-------	-------

b. Capaian Kinerja Pelayanan dan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2022-2024

No	Indikator	SPM/	IK K	Target Renstra SKPD					Target Renja	Realis asi	Catatan Analisis
		stand ar nasio nal		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	√		0	18	36	54	72	8	0	Belum diterbitkan SK Penetapan Penerima bantuan, dan pelaksanaan baru akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2025.
2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	√		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	0,00%	tidak terdapat warga negara yang harus direlokasi akibat program Pemerintah Daerah
3	Persentase Permukiman Layak Huni		√	99,05	99,32	99,55	99,78	100,00	99.89	99,89	Berita acara Penetapan Pengurangan Luasan Kumuh Tingkat Kota Tahun 2024 bahwa capaian pengurangan luasan kumuh s.d Tahun 2024 sebesar 83.02 Ha atau sisa 21,67 Ha dari total luasan 104.69 Ha
4	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni		√	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,02	0,00	Belum ada SK Penetapan Penerima Bantuan Korban

No	Indikator	SPM/	IK K	Target Renstra SKPD					Target Renja	Realis asi	Catatan Analisis
		stand ar nasio nal		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Bencana
5	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU		√	16.75	12.18	18.18	28.26	36.42	20.24	24.56	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU yang telah diserahkan ke Pemerinatah Kota Balikpapan sebanyak 10.235 daritotal 41670
6	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh		√	32,56	51,47	67,78	84,08	100,00	51,47	83.02	Target Penanganan kumuh ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui Kotaku untuk luasan kumuh diatas 15 Ha, Pemerintah Provinsi untuk luasan kumuh 10 Ha- 15 Ha, dan penanganan melalui dana APBD Kota untuk luasan kumuh dibawah 10 Ha. Pada akhir tahun 2022 telah tertangani 52,42 Ha kawasan kumuh dengan penangan oleh Kotaku seluas 51,01 Ha dan penanganan melalui APBD Kota Balikpapan seluas 1,41 Ha di RT. 4 Kelurahan Damai , Kecamatan Balikpapan Kota. Tahun 2023 terdapat 3,99 Ha penanganan

No	Indikator	SPM/	IK K	Target Renstra SKPD					Target Renja	Realis asi	Catatan Analisis
		stand ar nasio nal		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											kumuh. Tahun 2024 seluas 79.03 Ha
7	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota		√	0,00	0,01	0,01	0,02	0,03	0,01	0	tidak terdapat SK penetapan penerima bantuan akibat bencana
8	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	sesuai pendataan SPM Tahun 2024, tidak terdapat masyarakat yang harus direlokasi
9	persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kota yang di tangani		√	26,11	100,00	0,00	0,00	0,00	56.82	87	Penanganan kawasan kumuh Kota Balikpapan melalui APBD Kota Balikpapan di bawah 10 Ha seluas 16.67 Ha dari total 29.34
10	berkurangnya jumlah unit RTLH (rumah tidak layak huni)		√	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	100	pada 2023 terverifikasi menjadi sebanyak 517 RTLH. kemudian ditangani sebanyak 66 ditahun 2022, 100 unit ditahun 2023 dan 100 unit di tahun 2024 RTLH yang bersumber dari APBD
11	jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana,Sarana, dan Utilitas Umum)		√	16.75	12.18	18.18	28.26	36.42	20.24	20.24	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU yang telah diserahkan ke Pemerinath Kota Balikpapan sebanyak 8436 daritotal



No	Indikator	SPM/	IK K	Target Renstra SKPD					Target Renja	Realis asi	Catatan Analisis
		stand ar nasio nal		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											41.676
12	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		√	0	18	36	54	72	15	0	7.146 unit pada daerah resiko bencana longsor  4.898 unit pada daerah resiko rawan abrasi  2.030 unit pada daerah resiko kebakaran hutan  Belum terdapat penanganan unit rumah yang terkena bencana dikarenakan belum terdapat SK Penerima Bantuan Korban Bencana
13	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Belum terdapat SK penetapan penerima bantuan akibat bencana
14	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14	Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-360/2024 Tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana
15	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		√	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8	0	Tidak terdapat kegiatan rehabilitasi rumah korban bencana karena belum terdapat SK penetapan penerima bantuan akibat

No	Indikator	SPM/	IK K	Target Renstra SKPD					Target Renja	Realis asi	Catatan Analisis
		stand ar nasio nal		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											bencana
16	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0	sesuai pendataan SPM Tahun 2024 Tidak terdapat kegiatan pembangunan kembali untuk rumah korban bencana karena belum terdapat SK penetapan penerima bantuan akibat bencana
17	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	sesuai pendataan SPM Tahun 2024 Tidak terdapat kegiatan pembangunan baru untuk korban bencana karena belum terdapat SK penetapan penerima bantuan akibat bencana
18	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	belum terdapat SK penetapan penerima bantuan akibat bencana
19	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Belum terdapat SK penetapan penerima bantuan akibat bencana
20	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		√	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0	belum terdapat SK penetapan penerima bantuan akibat bencana
21	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	belum terdapat SK penetapan penerima bantuan akibat bencana

No	Indikator	SPM/	IK K	Target Renstra SKPD					Target Renja	Realis asi	Catatan Analisis
		stand ar nasio nal		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	berdasarkan rencana pemenuhan SPM										
22	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	belum terdapat SK penetapan penerima bantuan akibat bencana
23	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		√	0	0	0	0	0	0	0	belum terdapat SK penetapan penerima bantuan akibat bencana
24	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		√	0	0	0	0	0	0	0	belum terdapat SK penetapan penerima bantuan akibat bencana
25	Jumlah rumah tangga penerima layanan belum mendapatkan penyediaan rumah pemenuhan SPM layak huni berdasarkan rencana		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	belum terdapat SK penetapan penerima bantuan akibat bencana
26	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		√	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0	belum terdapat SK penetapan penerima bantuan akibat bencana
27	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha		√	3,99	0,00				12.67	3.81	capaian sisa luasan kumuh s.d Tahun 2024 di bawah 10 tinggal Ha 3.81 Ha dari total luasan29.34 Ha

No	Indikator	SPM/	IK K	Target Renstra SKPD					Target Renja	Realis asi	Catatan Analisis
		stand ar nasio nal		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		√	26,00	355,00	251,00	499,00	389,00	135	100	Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni bersumber dari dana APBD Tahun 2024 Kota Balikpapan sebanyak 100 unit rumah penerima bantuan untuk perbaikan/peingkatan kualitas berupa bantuan sosial barang seperti Material/Bahan Bangunan sebagai stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan upah tukang
29	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		√	49,91	78,90	103,90	128,90	153,30	12.68	79.03	capaian pengurangan luasan kumuh s.d Tahun 2024 sebesar 83.02 Ha (3.99Ha dan 79,03 Ha) atau sisa 21,67 Ha dari total luasan 104.69 Ha
30	Jumlah rumah di kab/kota		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Belum terdapat SK penerima bantuan akibat bencana
31	Jumlah unit PK RTLH		√	26	355	251	499	389	135	100	Terdapat 135 penerima bantuan stimulus RTLH
32	Jumlah rumah tidak layak huni		√	5565	5210	4959	4460	4071	135	100	
33	Jumlah rumah yang tidak dihuni		√	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	Belum dilakukan pendataan
34	Rasio rumah dan KK		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Jumlah rumah		√	1317	1817	2317	2817	3317			

No	Indikator	SPM/	IK K	Target Renstra SKPD					Target Renja	Realis asi	Catatan Analisis
		stand ar nasio nal		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pembanguna n baru			6	6	6	6	6			
36	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		√	3552 4	3730 0	3916 5	4112 3	4317 9	8436	10235	Perumahan yangterfasilit asi PSU dandiserahka n ke Pemerintah Kota
37	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		√	2224 5	4314 5	4887 3	5376 0	5913 6		40.90 2	Unit rumah dalam perumahan komersial
38	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan		√	0	0	0	0	0		41.670	Unit rumah dalam perumahan komersial
39	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)		√	0	0	0	0	0	0	40.771	Unit rumah dalam perumahan komersial
40	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		√	0	0	0	0	0	0	19.535	Unit rumah dalam perumahan komersial
41	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU		√	0	0	0	0	0	0	40.902	Unit rumah dalam perumahan komersial
42	Jumlah pengembang yang tersertifikasi		√	122	122	122	122	122	0	0	Tidak terdapat pendataan
43	Jumlah pengembang yang terregistrasi		√	122	122	122	122	122	0	0	
44	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan		√	50	50	50	50	50	50	50	
45	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		√	0	0	0	0	0	0	0	Belum terdapat SK penerima bantuan akibat bencana
46	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota		√	0	0	0	0	0	0	0	Belum terdapat SK penerima bantuan akibat bencana

No	Indikator	SPM/	IK K	Target Renstra SKPD					Target Renja	Realis asi	Catatan Analisis
		stand ar nasio nal		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni										
47	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.		√	2,75	2,57	2,45	2,22	2,01	2.45	0.12	Masih terdapat 251 rumah tidak layak huni dari 202.539
48	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.		√	97,25	97,43	97,55	97,88	97,99	99,89	99,89	Masih terdapat 251 rumah tidak layak huni dari 202.539

Capaian Kinerja Pnerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Balikpapan telah menetapkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-360/2024 Tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Selatan, dan Kecamatan Balikpapan Utara, serta pergerakan tanah/longsor di Rukun Tetangga 26 kelurahan Gunung Sari Ulu, Rukun Tetangga 02 Kelurahan Mekar Sari, Rukun Tetangga 14 Kelurahan Sumber Rejo, Rukun Tetangga 02 dan Rukun Tetangga 13 Kelurahan Karang Rejo, Rukun Tetangga 02 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Rukun Tetangga 01 dan Rukun Tetangga 06 Kelurahan Telaga Sari, Rukun Tetangga 09 dan Rukun Tetangga 14 Kelurahan Prapatan, Rukun Tetangga 39 Kelurahan Sepinggan, Rukun Tetangga 31 Kelurahan Muara Rapak, Rukun Tetangga 03 Kelurahan Gunung Samarinda, dan Rukun Tetangga 44 Kelurahan Graha Indah.
2. Pelaksanaan Kegiatan Updating Verifikasi data penerimaan rumah korban bencana alam Tahun 2024 oleh perangkat daerah Pengampu SPM Perumahan.
3. Hingga Akhir pelaksanaan Tahun Anggaran, dari hasil tahapan proses pelaksanaan SPM perumahan Tahun 2024 belum diterbitkan SK Penetapan Penerima bantuan, dan pelaksanaan baru akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2025.
4. Untuk pelaksanaan SPM Perumahan dikarenakan Program Pemerintah, Pemerintah Kota Balikpapan belum melaksanakan lebih lanjut dikarenakan belum adanya Program yang berpotensi untuk dilaksanakannya Relokasi.

c. Realisasi Kinerja Berdasarkan Capaian Sasaran Strategis Utama

Analisis dapat dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

a. Realisasi Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.5

Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024	
			Realisasi	capaian	Realisasi	capaian	Realisasi	capaian	Realisasi	capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni					99.83 %	100%	99.88	99.98
2	Meningkatnya Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU					12.18 %	84%	24.56	121.34
3	Berkurangnya luas awasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh					36.80 %	71%	88.35	130.36
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip DISPERKIM					72.55	96.73%	74.25	99.00

Pada tahun 2023 terdapat perubahan rumusan perhitungan indikator sasaran berdasarkan Berita Acara Hasil Koordinasi dan Asistensi Hasil Perubahan Perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yang di tandatangani pihak Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dan Inspektorat Kota Balikpapan, yaitu terdapat terdapat perubahan definisi operasional, rumus hitung dan target kinerja di tahun 2023-2026 berdasarkan:

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/8697/OTDA Perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Surat Edaran Sekretaris Dearah Nomor 060.4/01799/Org Tanggal 22 Desember 2023 Perihal Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023;
3. Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023

Adapun Perubahan Indikator Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

- a. Pada IKU “Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huniawal target Jumlah Penyediaan Rumah Layak Huni”, pada IKU awal hanya menghitung penyediaan rumah korban bencana, rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program terhadap jumlah rumah menjadi jumlah Unit Rumah Layak Huni adalah Jumlah unit rumah yang memenuhi persyaratan antara lain keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni, dapat mengacu pada data e-RTLH.
- b. Pada IKU “ Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU” , bahawa terdapat perubahan Definisi Operasional, Rumus hitung dan Target Kinerja di Tahun 2023-2026 karena pada IKU awal target pembanding adalah Jumlah total unit rumah kota baik swadaya maupun formal di Kota Balikpapan sehingga menjadi jumlah unit rumah di dalam perumahan formal (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).
- c. Pada IKU” Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh” , Terdapat perubahan kalimat pada Sasaran, Indikator, Rumus hitung dan target di Tahun 2023-2026 karena pada IKU awal target perbandingan adalah Jumlah Kawasan Kumuh Kota terhadap Jumlah Luasan Kumuh sesuai SK Kumuh Walikota BPN menjadi Jumlah Kawasan Kumuh Kota Yang ditangani terhadap (Jumlah Luasan Kumuh sesuai SK Kumuh Walikota BPN sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).
- d. Pada IKU “ Nilai SAKIP Disperkim”, terdapat perubahan sasaran, indikator sasaran yang sebelumnya adalah nilai Reformasi birokrasi menjadi nilai SAKIP Disperkim. Hal ini sesuai dengan Surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, bahwa karena nilai reformasi birokrasi sudah tidak dilakukan perhitungan kembali berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024.

Pada tabel 3.4 diatas diperoleh sandingan capaian kinerja kinerja utama pada sasaran strategis dengan realisasi capaian dari tahun 2021 sampai dengan 2024 sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Tahun 2021

- a. Realisasi pencapaian indikator sasaran yaitu persentase berkurangnya luas Kawasan kumuh sebesar 0 % diperoleh dari:

Persentase berkurangnya =  $\frac{\Sigma \text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Kawasan kumuh}} \times 100\%$

$\Sigma$  Rencana Luasan Kawasan Permukiman pada RTRW

=  $\frac{0}{11.500} \times 100\%$  11.500



= 0%

% Pencapaian Kinerja = tidak ada pencapaian kinerja

Realisasi sebesar 0 % pada indikator kinerja utama penurunan luasan kawasan kumuh dikarenakan pada akhir tahun 2019 Kota Balikpapan telah dinyatakan bebas kumuh berdasarkan Berita Acara Penyepakatan Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2019 Tingkat Kota Balikpapan sebesar 0 ha dari sisa 58,58 ha berdasarkan SK Wali Kota Balikpapan No.188.45-285/2019 tanggal 18 September 2019. Atas dasar SK tersebut, maka tidak ada kegiatan dengan tuntutan kinerja penurunan luasan kawasan kumuh diatas skor kumuh 19. Meskipun nilai skor kumuh sudah dibawah 19, masih terdapat tugas Disperkim dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar air minum dan prasana dan sarana pengelolaan air limbah.

Atas dasar hal tersebut, kegiatan yang dianggarkan pada tahun anggaran 2021 hanya berupa penanganan kumuh dibawah skor kumuh 19 yang terdiri atas:

1. Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.1.853.467.000,00 yang berasal dari DAK
2. Kegiatan Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dengan anggaran Rp. 437.000.000,00 dan terealisasi Rp. 404.783.470,00. Kegiatan ini terdiri atas penyusunan dokumen RP2KPKPK dan Pendampingan DAK.

Pada tahun 2020, kembali dikeluarkan SK Walikota Balikpapan Nomor 188.45-326/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan tanggal 20 November 2020. SK ini memuat kawasan permukiman kumuh baru di Kota Balikpapan. Kawasan permukiman kumuh baru ini baru akan ditangani pada RPJMD atau Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman periode 2021-2026 dengan berbagi kewenangan bersama- sama Permerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat.

Permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan kegiatan adalah terdapatnya pengurangan prasarana pengelolaan air limbah berupa sambungan rumah yang telah diupayakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman dikarenakan kurangnya pengawasan pihak berwenang di wilayah prasarana tersebut. Kurangnya pengawasan dan evaluasi ini menyebabkan rendahnya tingkat pemeliharaan prasarana pengelolaan air limbah oleh masyarakat pengguna sistem terpusat. Diperlukan penegakan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sanitasi secara berkelanjutan dari pihak- pihak terkait agar Prasana pengelolaan air limbah yang telah terpasang tetap terpelihara dan berfungsi dengan baik.

- b. Realisasi pencapaian indikator sasaran Persentase Penurunan *Backlog* Perumahan sebesar 147,77% dengan predikat sangat berhasil diperoleh dari :

$$\text{Persentase Backlog} = \frac{\Sigma \text{Backlog}}{\Sigma \text{Rumah}} \times 100\%$$

$$= \frac{94.039}{240.079} \times 100\%$$

$$= 39,17 \%$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Pencapaian Kinerja} &= \frac{75 - (39,17 - 75)}{75} \times 100\% \\ &= 147,77 \% \end{aligned}$$

APBN melalui skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan subsidi selisih bunga, dan bantuan uang muka.

Permasalahan yang dihadapi:

- a. Alokasi anggaran APBN maupun APBD untuk sektor perumahan, masih rendah
- b. Realisasi jumlah unit rumah yang terfasilitasi dengan pembiayaan KPR FLPP masih relatif rendah
- c. Realisasi pencapaian indikator sasaran persentase penurunan rumah tidak layak huni sebesar 165,48% dengan predikat sangat berhasil diperoleh dari:

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\Sigma \text{ Rumah Tidak Layak Huni}}{\Sigma \text{ Rumah}} \times 100 \\ \text{penurunan Rumah} & \\ \text{tidak layak huni} & \end{aligned}$$

$$= \frac{630}{240.079} \times 100\%$$

$$= 0,26\%$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Pencapaian} &= \frac{0,83 - (0,26 - 0,83)}{0,83} \times 100\% \\ \text{Kinerja} & \end{aligned}$$

$$= 168,67 \%$$

Berdasarkan data terbaru dari pekerjaan pendataan Rumah Tidak Layak Huni tahun 2021 diperoleh hasil bahwa terdapat 630 rumah tidak layak huni di Kota Balikpapan. Ini artinya dari target 1.015 RTLH di tahun 2021 ternyata menurut data terakhir bidang permukiman tahun 2021 hanya tersisa tersisa 630 unit.

Pencapaian target kinerja tersebut diakomodir melalui kegiatan:

1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Kegiatan ini memiliki anggaran Rp. 1.864.511.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.835.926.575,00. Kegiatan ini bersumber dari DAK . Kegiatan ini meliputi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 91 unit rumah.
2. Bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 100 unit rumah.

3. Bantuan dari Pemerintah Pusat dengan sumber dana APBN sebanyak 159 unit rumah.

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH Berdasarkan Sumber Dana Bantuan**

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan :  1. Hasil verifikasi calon	No	Sumber Dana	Jumlah Rumah
	1	DAK	91
	2	APBN	159
	3	Provinsi Kalimantan Timur	100

$$\text{Persentase penyediaan} = \frac{\Sigma \text{Luas Taman Kota}}{\text{Luas Kota}} \times 100\%$$

Tamankota                      Σ Luas Kawasan Perkotaan  
(354,62km<sup>2</sup>)

$$= \underline{340.396} \times 100\%$$

354.620.000

$$= 0,10\%$$

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \underline{0,10} \times 100\%$$

0,022

= 454,55 %

Pencapaian target kinerja penyediaan taman kota berhasil memenuhi target sebesar 454,55 %. Keberhasilan pencapaian yang besar terhadap penyediaan taman kota ini dikarenakan adanya penyerahan PSU berupa RTH di Perumahan Balikpapan Permai dan di Perumahan Balikpapan Baru kepada Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2020.

Berikut jumlah keseluruhan RTH di Kota Balikpapan sampai dengan tahun 2021.

**Tabel 2.7**

**Luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Balikpapan**

No	Kecamatan	Luas (m²)
1	Balikpapan Tengah	6.201
2	Balikpapan Utara	56.595,95

No	Kecamatan	Luas (m²)
3	Balikpapan Selatan	235.897
4	Balikpapan Timur	30.400
5	Balikpapan Barat	416,21
6	Balikpapan Kota	10.886
<b>J U M L A H</b>		<b>340.396,16</b>

Adapun kegiatan yang berkontribusi terhadap capaian target kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, dengan anggaran Rp. 23.550.590.916,00 dan terealisasi sebesar Rp. 22.067.980.840,38 (93,71%). Kegiatan ini mengakomodir peningkatan sarana dan prasana taman kota Balikpapan, peningkatan sarana dan prasarana pembibitan tanaman hias/ peneduh.
2. Realisasi pencapaian indikator sasaran Persentase ahli waris yang puas terhadap pelayanan permakaman 104,17% dengan predikat sangat berhasil diperoleh dari:

Persentase ahli waris yang puas terhadap pelayanan permakaman

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\Sigma \text{Ahli waris yang merasa puas}}{\Sigma \text{Ahli waris yang mengajukan pelayanan}} \times 100\% \\
 &= \frac{2.261}{2.261} \times 100\% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Pencapaian Kinerja} &= \frac{100}{98} \times 100\% \\
 &= 102,4 \%
 \end{aligned}$$

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut adalah kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian yang meliputi kegiatan operasional pendukung pemeliharaan permakaman di kota Balikpapan.

*Backlog* perumahan diartikan sebagai suatu kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Dengan pengertian ini, *backlog* Perumahan adalah kuantitas rumah yang belum/tidak tertangani. Backlog Perumahan dihitung berdasarkan konsep bahwa satu unit rumah persatu rumah tangga atau kepala keluarga.

Data *backlog* kepemilikan rumah kota Balikpapan tahun 2021 sebesar 94.039 unit, menggambarkan masih tingginya tingkat kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah yang dibutuhkan. Salah satu penyebab tingginya angka *backlog* perumahan ini disebabkan rendahnya pembiayaan sektor perumahan dari pemerintah maupun swasta. Solusi untuk mengatasi

*backlog* perumahan ini antara lain adalah dengan meningkatkan alokasi anggaran pemerintah untuk sektor perumahan dan perlunya skema skema pembiayaan perumahan yang tepat.

Diperlukan peran aktif seluruh stakeholder di bidang perumahan untuk menyelesaikan permasalahan *backlog* perumahan, antara lain Pemerintah kota dalam hal perijinan dan penetapan tata ruang, pengembang untuk meningkatkan pembangunan rumah dengan harga yang terjangkau serta masyarakat itu sendiri untuk membangun rumah yang layak huni secara swadaya. Pemerintah Kota perlu juga diharapkan untuk terus mendorong pengembang agar membangun rumah murah serta mentaati peraturan tentang pola pembangunan hunian berimbang seperti apa yang tertuang dalam RTRW Kota Balikpapan. Pengembang diharapkan tidak hanya membangun rumah mewah saja, tapi mereka juga harus ikut memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan membangun rumah sederhana.

Tingginya angka realisasi *backlog* perumahan tahun 2021 sebesar 94.039 unit, tetap menyumbang pencapaian kinerja yang sangat baik bagi Dinas Perumahan dan Permukiman.

Persentase penurunan *backlog* perumahan yang ditargetkan sebesar 75 % ternyata mampu dicapai hingga penurunan *backlog* perumahan sebesar 39,17%.

Keberhasilan pencapaian target indikator dilaksanakan melalui program pengembangan perumahan dengan anggaran Rp.4.155.000.000,00 mampu terealisasi Rp.3.383.523.057,12 atau sebesar 81,43%.

**1. Capaian Kinerja Tahun 2022**

- 1. Meningkatnya cakupan rumah layak huni. Sasaran ini Mengukur persentase rumah layak huni yang disediakan, difasilitasi oleh kota Balikpapan melalui penyediaan rumah korban bencana, rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program terhadap jumlah rumah di Kota Balikpapan. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase rumah layak huni. Rumus perhitungan sasaran ini adalah

Persentase rumah layak huni =

Jumlah penyediaan rumah layak huni

Jumlah total unit rumah Kota Balikpapan

X 100 %

=

0

202.539

X100 %

=

0,00%

Target kinerja tahun 2022 masih sebesar 0,00%. Realisasi indikator sasaran ini adalah sebesar 0,00%. Formulasi indikator sasaran ini adalah untuk menunjang penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program sesuai pelayanan yang diwajibkan oleh Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat. Tahun 2022 belum dilakukan penyediaan rumah layak huni tersebut, namun kegiatan dari program ini sebagian besar adalah berupa pendataan dalam rangka mempersiapkan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan dan relokasi program mulai tahun 2023 sampai dengan 2026. Berdasarkan hasil pendataan rumah yang terdampak pada tahun 2022 terdapat 74 unit yang terverifikasi untuk

dilakukan penanganan pada tahun mendatang dari 225 unit rumah terdata. Pendataan By Name By Address (BNBA) yang valid yang dilakukan pada tahun 2022 akan memicu peningkatan capaian kinerja sasaran Meningkatnya cakupan rumah layak huni ditahun yang akan datang.

Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai. Sasaran ini mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU. Sasaran ini diwakilkan oleh indikator Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU. Unit Rumah adalah jumlah unit rumah di dalam perumahan formal diukur dengan Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU.

Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU =

Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU

Jumlah total unit rumah Kota Balikpapan

X 100 %

=

44.507

202.539

X100 %

=

21,97 %

Target kinerja sasaran Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai Tahun 2022 adalah sebesar 16,75 %. Realisasi indikator sasaran ini adalah sebesar 21,97% dan memiliki capaian kinerja sebesar 131,19%. Pencapaian ini didukung oleh peningkatan iklim investasi di kota Balikpapan sebagai pendukung Ibu Kota Negara (IKN) yang berpengaruh terhadap bertumbuhnya sektor perumahan dan mengakibatkan peningkatan yang signifikan terhadap rumah yang terfasilitasi PSU. Laju pertumbuhan penduduk memicu *backlog* perumahan di kota besar termasuk di Balikpapan sehingga dibutuhkan hunian untuk masyarakat dan pegawai yang cukup banyak. Sektor perumahan merupakan sektor yang bertumbuh positif karena memiliki efek berganda *multiplier effect* yang dapat menghidupkan 174 sub sektor industri lain seperti pabrik material bahan bangunan, transportasi, lembaga pembiayaan seperti Bank, Koperasi, *financial*, teknologi, dan perdagangan. Bertumbuhnya sektor perumahan selain karena peningkatan iklim investasi sebagai dukungan terhadap IKN di Kalimantan Timur, juga didukung oleh adanya program sejuta rumah Kementrian PUPR yang menjadikan terfasilitasinya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat memiliki rumah yang terfasilitasi PSU dengan baik. Peningkatan rumah yang terfasilitasi PSU tidak serta merta lepas dari pengawasan Disperkim Kota Balikpapan dalam pemenuhan kualitas dan kewajiban PSU. Ketercapaian target kinerja ini tetap memerlukan konsistensi dan komitmen antara pengembang perumahan dan Disperkim sebagai *leading sector* bidang perumahan rakyat untuk mendukung ketersediaan PSU perumahan yang memadai. Hal ini ditandai oleh komitmen pimpinan Disperkim dengan terus dilakukannya pengawasan dan pengendalian serta evaluasi penyedia perumahan dalam penyediaan PSU yang memadai.

2. Mengurangi luas kawasan kumuh. Sasaran ini mengukur persentase berkurangnya luas kawasan kumuh sesuai dengan SK Luas Kumuh Kota Balikpapan Tahun 2020 seluas 153, 3 Ha. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh.

Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh=

Jumlah Luasan Kawasan Kumuh Kota

Jumlah Luasan Kumuh sesuai SK Kumuh Walikota BPN

X 100 %

153,30Ha

= 34,19 %

Target kinerja pengurangan luasan kawasan kumuh pada Tahun 2022 adalah sebesar 32,56 Ha. Target Penanganan kumuh tersebut ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui Kotaku untuk luasan kumuh diatas 15 Ha, Pemerintah Provinsi untuk luasan kumuh 10 Ha- 15 Ha, dan penanganan melalui dana APBD Kota untuk luasan kumuh dibawah 10 Ha. Pada akhir tahun 2022 telah tertangani 52,42 Ha kawasan kumuh dengan penangan oleh Kotaku seluas 51,01 Ha dan penanganan melalui APBD Kota Balikpapan seluas 1,41 Ha di RT. 4 Kelurahan Damai , Kecamatan Balikpapan Kota. Realisasi melebihi target untuk penanagan luasan kumuh oleh Pemerintah Pusat yang awalnya pada akhir Tahun 2022 di ramalkan hanya seluas 48,5 Ha ternyata terealisasi 51,01 Ha. Keberhasilan pencapaian target ini dikarenakan sangat baiknya kolaborasi penanganan kumuh Kota Balikpapan dengan Kotaku dari Kementrian PUPR . Tidak hanya itu, komitmen dari Kepala Daerah sangat mendukung percepatan pengurangan luasan kawasan kumuh sehingga permukiman layak huni Kota Balikpapan dapat tercipta secara optimal.

3. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim. Sasaran ini diukur dengan melaksanakan penilaian mandiri reformasi birokrasi (PMPRB) di unit kerja Disperkim. PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Sasaran ini memiliki indikator Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim.
4. Target kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim pada tahun 2022 adalah senilai 27. Realisasi yang didapat dari PMPRB Disperkim Tahun 2022 adalah 31,53. Adapun keberhasilan ini didukung oleh koordinasi internal Disperkim yang kuat dalam memenuhi area perubahan yang terdapat dalam Reformasi Birokrasi. Meskipun menjadi tahun penilaian pertama bagi Disperkim, namun komitmen pimpinan dalam menginternalisasi nilai reformasi birokrasi sangat tinggi. Komitmen Kepala Dinas dalam hal ini adalah dengan dimuatnya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Disperkim Kota Balikpapan pada Perjanjian Kinerja Kepala Disperkim kepada Walikota Kota Balikpapan. Dengan dimuatnya hal tersebut, kinerja Kepala Disperkim dinilai berhasil jika hasil PMPRB Disperkim memenuhi target yang telah ditetapkan. Pimpinan Disperkim menilai pemenuhan nilai reformasi birokrasi yang baik merupakan modal bagi Disperkim Kota Balikpapan dalam pemberian pelayanan publik bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang baik.

## 2. Realisasi Kinerja Tahun 2023

- a. **Sasaran I “ Meningkatkan cakupan rumah layak huni”,** dengan Indikator **“Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni”,** dengan realisasi sebesar **99,83** dari target **99,83** sehingga capaian sebesar **100%** dengan **kriteria”Tercapai/Sesuai Target”**.
- b. **Sasaran II “ Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai”** dengan Indikator **“Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU”,** terdapat realisasi sebesar **12,18%** dari target **14,5%** atau capaian sebesar **84%** dengan **kriteria “ Tidak Tercapai”**.
- c. **Sasaran III” Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh”** dengan Indikator **“Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh,** terdapat realisasi sebesar **36.80%** dari target **51,47%** atau capaian sebesar **71,49%** dengan **kriteria “ Tidak Tercapai”**.
- d. **Sasaran IV ‘Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”,** dengan realisasi sebesar **74,25** dari target **75** sehingga capaian sebesar **97.70%,** dengan **kriteria “Tidak Tercapai”**.

Berdasarkan analisis capaian setiap indikator maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada capaian kinerja target sasaran strategis pada tahun 2023 terdapat 4 (empat) indikator, yaitu:
- a. Pada Sasaran I **“Meningkatnya cakupan rumah layak huni”**, dengan Indikator **“Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni”**, dengan realisasi sebesar **99,83** dari target **99,83** sehingga capaian sebesar **100%** dengan **kriteria”Sangat Tinggi”**. Adapun perolehan nilai adalah sebagai berikut:

Persentase rumah layak huni	=	$\frac{\text{Jumlah penyediaan rumah layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah Kota Balikpapan}} \times 100\%$
	=	$\frac{202.188}{202.539} \times 100\%$
	=	99.83%

Pada target tahun 2023 terdapat 202.188 rumah layak huni dari total 202.539 unit rumah se- Kota Balikpapan (RP3KP). Hal ini didukung oleh capaian kinerja kegiatan dalam Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni bersumber dari dana APBD Tahun 2023 Kota Balikpapan sebanyak 100 unit rumah penerima bantuan untuk perbaikan/peningkatan kualitas berupa bantuan sosial barang seperti Material/Bahan Bangunan sebagai stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menerima bantuan untuk berswadaya secara berkelompok gotong-royong melaksanakan perbaikan masing-masing rumah secara bergantian. Terdapat 11 Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BSPKRTLH) Tahun 2023 yaitu: 1.Kelurahan Karang Rejo 2. Kelurahan Karang Jati 3. Kelurahan Gunung Sari Ulu 4. Kelurahan Sumber Rejo 5. Kelurahan Sungai Nangka 6. Kelurahan Baru Ilir 7. Kelurahan Manggar Baru 8. Kelurahan Karang Joang 9. Kelurahan Damai 10. Kelurahan Prapatan 11. Kelurahan Klandasan Ilir.

- b. Pada sasaran Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai. Berdasarkan data, baru sebesar 4963 unit rumah dalam perumahan dalam hal ini adalah perumahan komersil yang difasilitasi PSU dan diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan dari 40,152 unit rumah. Adapun penilaian indikator Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU”, terdapat realisasi sebesar **12,18%** dari target **14,5%** sebagai berikut:

Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU =	$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah total unit rumah dalam perumahan}} \times 100\%$
	$\frac{4963}{40,152} \times 100\%$
	=12.18 %

- c. Pada sasaran III Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh” dengan Indikator ‘Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh, terdapat realisasi sebesar **36.80%** dari target



**51,47%** atau capaian sebesar **71,49%**, diperoleh kriteria penilaian realisasi kinerja ”sedang” atau belum tercapai karena capaian penanganan Kawasan kumuh untuk di target 2023 sebesar 3,99 sudah tercapai namun masih terdapat kawasan kumuh di atas 10 Ha yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan di atas 15 Ha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, pada tahun 2023 hanya terdapat penanganan dari Pemerintah Kota Balikpapan. Adapun penanganan kumuh tahun 2023 berupa Pekerjaan Penanganan Sistem Sanitasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan berupa Pembangunan IPAL Komunal Skala Permukiman, Perbaikan saluran Drainase, dan Jalan Lingkungan. Pada tahun 2023 terdapat luasan kawasan kumuh baru sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-203/2023 Tentang Hasil Peninjauan Ulang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan.

Perhitungan indikator ‘Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh, terdapat realisasi sebesar 36.80% adalah sebagai berikut:

Persentase berkurangnya  
luas kawasan kumuh=

Jumlah Luasan Kawasan  
Kumuh Kotayang ditangani

Jumlah Luasan Kumuh sesuai  
SK Kumuh Walikota BPN

X 100 %

=

56.41 Ha

X 100%

153.3

=

36.8%

- d. Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tidak tercapai 100% walaupun nilai LHE atas SAKIP Dinas Perumahan dan Permukiman tahun di tahun 2022 adalah 72,55 menjadi 74.25.

Adapun penilaian setiap komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8

Nilai LHE atas SAKIP Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2023

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30	23,77	23,90
2	Pengukuran Kinerja	30	21,69	22,21
3	Pelaporan Kinerja	15	10,39	10,67
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	16,71	17,47

Sumber data: LHE SAKIP

3. Realisasi Kinerja Tahun 2024

Adapun realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. **Sasaran I “ Meningkatkan cakupan rumah layak huni”**, dengan Indikator **“Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni”**, dengan realisasi sebesar **99,88%** dari target **99,89%** sehingga capaian sebesar **99.98%** dengan **kriteria”tidak tercapai”**.

- b. **Sasaran II “ Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai” dengan Indikator “Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU”,** terdapat realisasi sebesar **24.56%** dari target **20.24 %** atau capaian sebesar **121,34%** dengan **kriteria “ Melebihi Target”**.
- c. **Sasaran III“ Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh” dengan Indikator “Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh,** terdapat realisasi sebesar **88,35%** dari target **67.78%** atau capaian sebesar **130.36%** dengan **kriteria “ Melebihi Target”**.
- d. **Sasaran IV ‘Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”,** dengan realisasi sebesar **74,25** dari target **76** sehingga capaian sebesar **97.70%**, dengan **kriteria ”Tidak Tercapai”**.

Berdasarkan analisis capaian setiap indikator maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada capaian kinerja target sasaran strategis pada tahun 2024 terdapat seluruh indikator dengan kriteria penilaian realisasi kinerja ”Sangat Tinggi”, namun terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target100%.
2. Adapun capaian kinerja sasaran strategis yang realisasinya >=100% adalah ssebagaai berikut:
  - a. Pada sasaran II “**Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai” dengan Indikator “Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU”,** terdapat realisasi sebesar **24.56%** dengan kriteria kinerja “sangat tinggi” dengan capaian sebesar **121.34%**, namun masih banyak PSU perumahan yang belum diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan. Berdasarkan data, Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU yang telah diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan sebesar 10.235 unit rumah Balikpapan dari 41.670 unit rumah pada perumahan. Terdapat 6 perumahan yang sudah di serahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan yaitu:
    - 1) Balikpapan Baru
    - 2) Balikpapan Permai
    - 3) Tamansari Bukit Mutiara Perumahan
    - 4) Balikpapan Regency
    - 5) Pesona Bukit Batiuah I
    - 6) Pesona Bukit Batuah 2
    - 7) Sepinggian Pratama
    - 8) Kumala Residence 4
    - 9) Kumala Residence 5
    - 10) Griya Karang Joang Asri 1
    - 11) Bukit Batakan Permai
    - 12) Neo Batakan Permai

Perhitungan Indikator “Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi

PSU”, terdapat realisasi sebesar 24.56% adalah sebagai berikut:

Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU =

Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU

=

10.235

41.670

X100 %

Jumlah total unit rumah dalam perumahan

=

24.56 %

b. Pada sasaran III **“Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh” dengan Indikator** ‘Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh, terdapat realisasi sebesar **88.35%** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja ”sangat tinggi” atau capaian penanganan Kawasan kumuh sampai dengan Tahun 2024 sebesar 83.02 Ha atau sisa 21,67 Ha dari total luasan 104.69 Ha sesuai Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-203/2023 Tentang Hasil Peninjauan Ulang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan.

Tabel 2.9

Realisasi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

No	Kelurahan	Luas berdasark an SK 2023	Luas Penangan Yang Telah dilakukan	Sisa Luas
1	Sepinggan raya	3.81	0	3.81
2	Gunung Sari Ulu	19.23	19.23	0
3	Gunung Sari Ulu	4.37	4.37	0
4	Gunung Sari Ulu	17.65	5.22	12.43
5	Karang Jati	4.53	4.53	0
6	Karang Jati	16.11	13.6	2.51
7	Karang Jati	11.39	11.39	0
8	Karang Rejo	1.56	1.56	0
9	Karang Rejo	0.58	0.58	0
10	Klandasan Ilir	10.39	7.47	2.92
11	Damai	3.99	3.99	0
12	Baru Ilir	6.34	6.34	0
13	Baru Ilir	1.18	1.18	0
14	Baru Ilir	3.56	3.56	0
	Total	104.69	83.02	21.67

Sumber :Bidang Permukiman

**Indikator** ‘Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh, terdapat realisasi sebesar **88.35%** diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

=

135.44 Ha X 100%

Jumlah Luasan Kawasan Kumuh Kotayang ditangani

Jumlah Luasan Kumuh sesuai SK Kumuh Walikota BPN

Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh=

153, 30 Ha

X 100 %

88.35%

Adapun capaian yang belum 100% adalah sebagai berikut:

- a. Pada Sasaran I **“Meningkatnya cakupan rumah layak huni”**, dengan Indikator **“Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni”**, dengan realisasi sebesar **99,88%** dari target **99,89%** sehingga capaian sebesar **100.29%** dengan **kriteria”Melebihi Target”**.

Pada target tahun 2024 terdapat 202.323 rumah layak huni dari total 202.539 unit rumah se- Kota Balikpapan (RP3KP). Hal ini didukung oleh capaian kinerja kegiatan dalam Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni bersumber dari dana APBD Tahun 2024 Kota Balikpapan dengan target sebanyak 135 unit rumah penerima bantuan untuk perbaikan/peningkatan kualitas berupa bantuan sosial barang seperti Material/Bahan Bangunan sebagai stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menerima bantuan untuk berswadaya secara berkelompok gotong-royong melaksanakan perbaikan masing-masing rumah secara bergantian. Terdapat 100 Penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BSPKRTLH) Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 1.88.45-371/2024 dan Nomor 1.88.45-437/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2024. Total sampai dengan tahun 2024 sebanyak 266 unit melalui APBD sehingga masih terdapat target sampai dengan tahun 2026 sebanyak 251 Unit rumah .

**Tabel 2.10**  
**Realisasi Kinerja Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Sampai Dengan Tahun 2024**

BASE LINE TARGET RENSTRA s.d 2026	REALISASI			TARGET	SISA
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>517</b>	<b>66</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>151</b>

Adapun realisasi kinerjanya diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Persentase rumah layak huni =

Jumlah penyediaan rumah layak huni

Jumlah total unit rumah Kota Balikpapan

202.323

202.539

X 100 %

X100 %

= 99.88%

- b. Pada sasaran IV **Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** tidak tercapai 100% karena nilai LHE atas SAKIP Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2024 sebesar 74.25 . Adapun penilaian setiap komponen adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.11**  
**Nilai LHE atas SAKIP Dinas Perumahan dan Permukiman**  
**Tahun 2024**

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2024	Nilai 2025
1	Perencanaan Kinerja	30	23,90	24,55
2	Pengukuran Kinerja	30	22,21	22,21
3	Pelaporan Kinerja	15	10,67	11,01
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	17,47	18,37
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		<b>74.25</b>	<b>76.14</b>
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		<b>BB</b>	<b>BB</b>

Sumber Data: LHE SAKIP

Berdasarkan tabel diatas maka terdapat kenaikan pada setiap komponen nilai. Terdapat saran rekomendasi dari Inspektorat yang harus ditindaklanjuti oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dalam rangka mengefektifkan penerapan AKIP, yaitu:

1. Agar memperbaharui SOP Pengumpulan data kinerja dengan memuat penggunaan aplikasi yang ada, sehingga mekanisme pengumpulan data kinerja dapat diandalkan.
2. Melakukan reviu atas target indikator yang telah terlampaui dan meningkatkan target indikator yang telah tercapai pada perjanjian kinerja sehingga target lebih menantang dan realistis.
3. Menyusun monitoring evaluasi rencana aksi dengan mencantumkan target dan realisasi indikator kinerja sasaran serta memuat rencana akti tindak lanjut dan menindaklanjutinya.
4. Agar setiap pegawai terus meningkatkan pemahaman dan kepedulian serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
5. Agar meningkatkan capaian kinerja pada seluruh indikator kinerja dengan dukungan basis data dan informasi.
6. Agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

d. **Realisasi Keuangan yang mendukung Sasaran Strategis Utama**

1) **Realisasi Keuangan Tahun 2022**

**Tabel 2.12**  
**Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota**  
**Balikpapan Kota Balikpapan**  
**Tahun 2022**

PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	REALISASI	%
Rp.22.066.726.478,46	Rp23.119.226.478	Rp19.168.930.499	82,91

2) **Realisasi Keuangan Tahun 2023**

**Tabel 2.13**

**Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota  
Balikpapan Kota Balikpapan  
Tahun 2023**

PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	REALISASI	%
23.171.999.815	28.023.816.668,00	23.870.222.903,00	85.18

a. **Realisasi Keuangan Tahun 2024**

**Tabel 2.14**

**Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota  
Balikpapan Kota Tahun 2024**

PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	REALISASI	%
38.735.932.000,00	45.659.017.450	37.568.430.159,24	82.28

**2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok sasaran layanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan secara umum adalah masyarakat yang membutuhkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan serta pihak-pihak terkait dengan pengelolaan dan pengembangan perumahan. Adapun kelompok sasaran layanan Dinas Perumahan Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

**1. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)**

Masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan bantuan untuk perumahan murah atau sibsidi. Sebagai langkah strategis untuk mewujudkan target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah yang sejalan dengan Asta Cita, pemerintah berkomitmen untuk mengakselerasi penyediaan rumah murah bagi rakyat. Pemerintah akan mendukung pembiayaan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui berbagai instrumen antara lain Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Subsidi Selisih Bunga (SSB), FLPP, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), DAK Fisik Perumahan, Pembebasan PPN dan Pembangunan Rusun dan Rusus.

Dinas Perumahan dan Permukimana Kota Balikpapan telah menyediakan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui:

- a. Penyediaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana telah ditetapkan besaran tarif sewa pemakaian Rusunawa dan tarif khusus untuk Disabilitas serta kios untuk UMKM. Terdapat 9 (sembilan) Tower Rusunawa, sebagai berikut:

**Tabel 2.15**  
**Rumah Susun Sewa Pemerintah Kota Balikpapan**

NO	RUSUNAWA	JUMLAH HUNIAN	JUMLAH TERISI	SISA HUNIAN	PERSENT ASE
1	Damai	50	50	0	100.00
2	Sepinggan 1	72	72	0	100.00
3	Sepinggan 2	68	45	23	66.18
4	km 7	96	89	7	92.71
5	Siaga	96	91	5	94.79
6	Manggar	94	32	62	34.04
7	Somber	96	74	22	77.08
8	Perusda 1	96	79	17	82.29
9	Perusda 2	84	74	10	88.10
	<b>Total</b>	<b>752</b>	<b>606</b>	<b>146</b>	<b>80.59</b>

b. Penyediaan  
Rumah Layak Huni.

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:

- 1) Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita (sufficient living space).
- 2) memiliki akses terhadap air minum layak
- 3) memiliki akses terhadap sanitasi layak
- 4) ketahanan bangunan (durable housing), yaitu atap terluas berupa beton/ genteng/ seng/ kayu/ sirap; dinding terluas berupa tembok/ plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/ granit/ keramik/ parket/vinil/karpet/ ubin/tegel/teraso/ kayu/papan/ semen/bata merah.

Terdapat Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pedoman Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BSPKRTLH) dan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Nomor 188.4/0179/DISPERKIM Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran dan pemanfaatan BSPKRTLH, bahwa salah satu syarat penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BSPKRTLH adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

2. Masyarakat Umum

Sasaran penerima layanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan secara umum adalah masyarakat yang tinggal pada kawasan perumahan dan permukiman, baik perumahan formal dan swadaya. Perumahan swadaya merupakan perumahan yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat yang berada di kawasan permukiman. Pada kawasan permukiman yang masuk pada kawasan permukiman kumuh akan dilakukan penataan permukimannya yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota, dan untuk kawasan yang berada di luar kawasan kumuh

dilakukan pencegahan terhadap tumbuh berkembangnya permukiman kumuh.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor ...../2025 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan Tahun 2025. Adapun luasan kawasan perumahan dan permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.16**  
**Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH RT	LUAS DELINEASI (Ha)
1	Balikpapan Barat	Baru Ulu	12 RT	14.25
2	Balikpapan Barat	Marga Sari	15 RT	14.03
3	Balikpapan Barat	Baru Tengah	11 RT	9.97
4	Balikpapan Utara	Muara Rapak	9 RT	6.05
5	Balikpapan Tengah	Karang Rejo	12 RT	10.19
6	Balikpapan Tengah	Karang Jati	10 rt	14.36
7	Balikpapan Tengah	Gunung Sari Ulu	7 RT	12.44
8	Balikpapan Kota	Klandasan Ulu	7 RT	10.88
9	Balikpapan Kota	Prapatan	11 RT	10.19
10	Balikpapan Selatan	Damai Bahagia	5 RT	7.29
11	Balikpapan Selatan	Sungai Nangka	2 RT	6.57
12	Balikpapan Timur	Manggar	3 RT	8.81
13	Balikpapan Timur	Manggar Baru	3 RT	10.59
TOTAL		13 KELURAHAN	90 RT	135.62

**3. Masyarakat yang Terdampak Bencana dan Terkena Relokasi Program Pemerintah**

Untuk masyarakat yang terdampak bencana dan atau terkena relokasi program pemerintah merupakan layanan SPM urusan perumahan rakyat. Ketentuan bencana yang dapat dilayani dengan SPM adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor.

Warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni adalah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan rehabilitasi rumah, pembangunan kembali rumah, pemukiman kembali, dan bantuan akses rumah sewa layak huni. Warga negara korban bencana dan relokasi korban pemerintah kabupaten/kota yang mendapatkan layanan rehabilitasi rumah, pembangunan kembali rumah, pemukiman kembali, dan bantuan akses rumah sewa layak huni berdasarkan Surat keputuan Walikota.



Bagi Pemerintah Daerah yang tidak terdapat bencana yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu tetap melakukan pengumpulan data dalam bentuk:

- a. identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana;
  - b. identifikasi lahan potensial; dan
  - c. data rumah yang terkena bencana;
- sehingga diperoleh capaian pendataan senilai 100%.

Program Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka:

- a. Pengurangan kawasan kumuh kurang dari 10 Ha;
- b. penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman;
- d. pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau.
- e. pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana.

Warga negara terkena relokasi akibat program kabupaten/kota adalah warga negara terkena relokasi yang mendapatkan layanan penggantian hak atas pengusahaan tanah dan/atau bangunan, dan bantuan akses rumah sewa layak huni.

Bagi Pemerintah Daerah yang tidak terdapat relokasi program Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu tetap melakukan pengumpulan data dalam bentuk:

- a. Perumahan di lokasi.
- b. Perumahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- c. Perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi.
- d. Perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan.
- e. Perumahan yang berada di daerah rawan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun, dan/atau Rumah Khusus sehingga diperoleh capaian pendataan senilai 100%.

#### **4. Pengembang Perumahan**

Dinas Perumahan memberikan layanan berupa fasilitasi pemberian rekomendasi rencana tapak/siteplan perumahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu terdapat layanan pengendalian dan pembangunan dan pengembangan Perumahan sesuai dengan izin yang telah disahkan. Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan Dan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyerahan Dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Pemukiman, bahwa pengembang mempunyai kewajiban untuk menyerahkan PSU Perumahan ke Pemerintah Kota Balikpapan.

#### **5. Perangkat Daerah dan Instansi Terkait Lainnya**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan sangat membutuhkan kolaborasi, sinergi, koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait untuk keberlanjutan pengelolaan urusan perumahan dan kawasan permukiman, seperti Dinas PU untuk penyediaan infrastruktur pelayanan dasar pada PSU jalan utama dan bendali perumahan serta kawasan permukiman, DLH untuk RTH dan Pengelolam TPS/TPS-T yang berada di kawasan luar Cluster perumahan formal yang PSUnya diserahterimakan serta di kawasan permukiman, DPMPSTSP terkait penerbitan izin Siteplan, DKK terkait fasilitas kesehatan, Disdikbud terkait fasiltasi pendidikan, DPOP terkait fasilitas sarana olahraga, Bagian Hukum terkait dengan penerbitan peraturan urusan perumahan dan permukiman. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terkait dengan layanan SPM urusan perumahan rakyat dan layanan pemadam kebakaran di perumahan formal dan kawasan permukiman kumuh, DPPR terkait dengan penataan perumahan dan permukiman yang sesuai dengan RTRW Diskominfo terkait layanan Sistem Informasi PKP dan SIM Rusun, Dishub terkait penyediaan PSU dan rambu jalan, Pol PP terkait dengan penegakan Perda serta Pemerintah, PDAM/Perumda Tirta Manuntung Balikpapan terkait dengan layanan air bersih, Provinsi dan Pusat dalam penanganan perumahan dan penataan kawasan permukiman yang menjadi kewenangannya sesuai dengan peraturan. Terkait dengan layanan data perumahan dan permukiman Kota Balikpapan melalui BPS Kota Balikpapan.

#### **6. Lembaga Non Pemerintah**

Layanan untuk Lembaga Non Pemerintah adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kelurahan terkait dengan pengawasan perekonomian masyarakat, Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) terkait dengan pendampingan pelaksanaan kegiatan KOTA KITA untuk pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kawasan permukiman kumuh.

#### **7. Swasta**

Sasaran layanan Disperkim Kota Balikpapan ke swasta terkait dengan pendataan RTLH yang telah diverifikasi untuk dapat diberikan bantuan stimulan RTLH melalui program CSR Perusahaan dan Perbankan.

#### **8. Media massa**

Sasaran layanan untuk media massa terkait dengan informasi kegiatan urusan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan .

### **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja sasaran IKU Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2022-2024 dan pemetaan target program prioritas RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, isu-isu global, nasional dan regional yang dapat mempengaruhi baik secara langsung Kdan tidak langsung kinerja maka diperoleh Identifikasi permasalahan dan Isu strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan untuk penentuan prioritas dan sasaran pada pembangunan daerah Tahun 2025-2029.

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan urusan perumahan dan kawasan permukiman sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17

Identifikasi Permasalahan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Penyebab masalah /Akar Masalah
Masih adanya backlog perumahan	Tidakseimbangnya ketersediaan jumlah rumah dengan kebutuhan hunian khususnya Kebutuhan rumah milik (termasuk Masyarakat miskin dan MBR)	<div>1. Jumlah penduduk yang terus bertambah;</div> <div>2. Rendahnya tingkat keterjangkauan MBR tingginya harga rumah dan rendahnya daya beli masyarakat khususnya Rendahnya tingkat keterjangkauan MBR;</div> <div>3. Belum optimalnya fasilitasi pembiayaan perumahan</div> <div>4. belum optimalnya keterlibatan pemerintah kota dalam penyediaan rumah MBR;</div> <div>4. Belum optimalnya program pemberdayaan masyarakat (dijelaskan bagaimana program pemerintah untuk penanganan backlog);</div> <div>5. kebutuhan akan lahan untuk pengembangan</div> <div>infrastruktur dan perumahan semakin meningkat;</div> <div>6. Keterbatasan Lahan untuk Pengembangan Infrastruktur dan Perumahan;</div> <div>7. Masih kurangnya pengembangan perumahan publik berbasis rumah susun/vertikal di tengah perkotaan</div>
Belum optimalnya kualitas terhadap perumahan dan kawasan permukiman layak huni	Belum optimalnya Perencanaan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	<div>1. Belum lengkapnya data dan dokumentasi perencanaan sektor perumahan;</div> <div>2. Belum selesainya review dokumen RP3KP;</div> <div>3. Adanya alih fungsi pemanfaatan lahan non komersial di dalam kawasan perumahan;</div> <div>4. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan pengembangan perumahan;</div> <div>5. Belum terdapat mekanisme standarisasi penyediaan minimum kebutuhan PSU dalam perencanaan pengembangan perumahan baru;</div>

Masalah Pokok	Masalah	Penyebab masalah /Akar Masalah
		6. Belum sesuai nya perencanaan perumahan dengan data topografi/kontur kawasan perumahan dan data kepemilikan lahan
	Belum terpenuhinya PSU pada lingkungan perumahan	<p>1. Belum Validnya data PSU Eksisting yang sesuai dengan perencanaan Siteplan yang telah disahkan;</p> <p>2. Masih banyak pengembang yang tidak menyediakan PSU secara memadai di perumahan;</p> <p>3. Belum semua prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan yang ada di Balikpapan diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan;</p> <p>4. Pembangunan perumahan dan infrastruktur belum terintegrasi;</p> <p>5. Belum optimalnya pengawasan Perizinan dan pemenuhan standar keandalan bangunan;</p> <p>6. belum optimalnya penyediaan perumahan yang serasi dengan tata ruang</p>
	masih terdapat Rumah Tidak layak Huni (RTLH)	<p>1. Belum validnya data RTLH berdasarkan data terpilah pada kawasan kumuh, di luar kumuh , di lokasi rawan bencana dan kawasan khusus untuk menentukan penanganannya;</p> <p>2. Belum seluruh data RTLH terverifikasi masuk kreteria penerima bantuan RTLH;</p> <p>3. adanya RTLH yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan;</p> <p>4. sebagian besar pemilik RTLH merupakan warga yang tidak mampu (MBR) untuk memperbaiki rumahnya sendiri;</p> <p>5. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat, keterlibatan CSR, swasta, dan akademisi;</p> <p>6. erdapat permukiman yang tidak terakses air minum dan sanitasi layak</p>
	Masih terdapat kawasan kumuh	<p>1. Sistem pendataan kawasan kumuh belum optimal;</p> <p>2. belum terdapat sistem untuk pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan masyarakat;</p> <p>3. Belum terpenuhinya pembangunan insfrastruktur yang meliputi 7 indikator kekumuhan;</p>

Masalah Pokok	Masalah	Penyebab masalah /Akar Masalah
		4. Kurangnya koordinasi terkait intervensi kewenangan penanganan kawasan permukiman kumuh ;  5. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat
	Belum optimalnya tingkat hunian rusunawa	1. Belum optimalnya fasilitas layanan gedung rusunawa;  2. Belum seluruh pembangunan rusunawa berbasis gender;  3. Belum optimalnya sosialisasi rusunawa;  4. Pembangunan gedung rusunawa yang jauh dari akses perkotaan;  5. Kurangnya SDM Teknis rusunawa;  6. Belum dilakukan peninjauan ulang terkait syarat huni dan harga rusunawa
	Terbatasnya Lahan Pemakaman	1. Pemerintah daerah belum menyediakan lahan landbanking untuk lahan pemakaman;  2. Luasan lahan untuk pemakaman terbatas;  3. Belum seluruh penembang perumahan menyerahkan kewajiban penyediaan lahan pemakaman dengan ketentuan sebesar 2% luasan perumahan
	Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat	1. Belum tersedianya lahan untuk relokasi warga akibat bencana /relokasi program pemerintah;  2. Belum optimalnya sinergitas dalam implementasi penerapan SPM perumahan rakyat yang sesuai ketentuan

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu-isu strategis sesuai lingkungan dinamis yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Disperkim antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 2.18  
Isu-isu strategis Perangkat Daerah

Potensi yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan an PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1. Kerjasama lintas sektor untuk penanganan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukima;  2. Pengembangan Sistem Informasi Perumahan dan kawasan permukiman	1. Tidakseim bangnya ketersedia an jumlah rumah dengan kebutuhan hunian khususnya Kebutuhan rumah milik (termasuk Masyarakat miskin dan MBR);  2. Belum optimalnya Perencana an pengembangan perumahan dan kawasan permukim an ;  3. Belum terpenuhi nya PSU pada lingkungan perumahan;  4. masih terdapat Rumah Tidak layak Huni (RTLH);  5. Masih terdapat kawasan kumuh;  6. Belum optimalnya tingkat hunian rusunawa;  7. Terbatas nya Lahan Pemakam an;  8. Belum optimalnya pelaksana na Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat	1. Dampak bangkitan pembanguna n IKN;  2. Optimalisasi Pengelola an Sanitasi, Limbah dan Sampah;  3. Degradasi kawasan pesisir dan laut	1. Demografi Global;  2. Urbanisasi Dunia;  3. Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan dan merata	1. Krisis Lingkungan ;  2. Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif	1. Insfrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang ekonomi;  2. Pengentasan kemiskinan dan kesenjanga;  3. Kualitas Lingkungan hidup dan Penurunan emisi GRK	Belum optimalnya akses dan kualitas terhadap perumahan dan kawasan permukiman layak huni, terjangkau dan berkelanjutan

**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN**

**3.1 Tujuan Renstra dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Kegiatan perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Balikpapan merupakan indikator yang mendasari perumusan strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman.

**3.1.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan perumahan dan permukiman di Kota Balikpapan, terdapat 2 (dua) acuan yang menjadi landasan utama, yaitu: arahan kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Kota Balikpapan yang tertuang di dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029. Dari arah kebijakan RPJMD Kota Balikpapan Barat Tahun 2025-2029 dapat dikelompokkan komponen tujuan dan sasaran pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan TUPOKSI Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

Dalam rangka mendukung visi dan misi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2025 ditetapkan 1 (satu) tujuan strategis yang menjadi landasan pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan selama periode 2025-2029, yaitu **“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan”** Tujuan ini memiliki indikator tujuan **“Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perumahan dan Permukiman”**.

Adapun rumusan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:  
Jumlah dari pembobotan dikali:

1. Target Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kab/ Kota yang ditangani, dengan bobot 30%.
2. Target Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) Memadai, dengan bobot 30%.
3. Target Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni, dengan bobot 40%

$$IKLI = \Sigma (bobot \times target) / 100$$

Jumlah Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perumahan dan Permukiman adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan infrastruktur Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1. Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani, dengan rumusan perhitungan sebagai berikut:

Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha)

-----x100%

Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha selama periode renstra 2025-2029 dikalikan 100%

Target Penanganan Kawasan kumuh Kota Balikpapan

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH RT	LUAS DELINEASI (Ha)	RENCANA TAHUN PELAKSANAAN
1	Balikpapan Barat	Baru Ulu	12 RT	14.25	2027
2	Balikpapan Barat	Marga Sari	15 RT	14.03	2027
3	Balikpapan Barat	Baru Tengah	11 RT	9.97	2026
4	Balikpapan Utara	Muara Rapak	9 RT	6.05	2027
6	Balikpapan Tengah	Karang Rejo	12 RT	10.19	2028
7	Balikpapan Tengah	Karang Jati	10 rt	14.36	2026
8	Balikpapan Tengah	Gunung Sari Ulu	7 RT	12.44	2026
9	Balikpapan Kota	Klandasan Ulu	7 RT	10.88	2028
10	Balikpapan Kota	Prapatan	11 RT	10.19	2029
11	Balikpapan Selatan	Damai Bahagia	5 RT	7.29	2028
12	Balikpapan Selatan	Sungai Nangka	2 RT	6.57	2929
13	Balikpapan Timur	Manggar	3 RT	8.81	2030
12	Balikpapan Timur	Manggar Baru	3 RT	10.59	2030
	TOTAL	13 KELURAHAN	90 RT	135.62	

2. Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni, dengan rumusan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah rata-rata realisasi selama periode renstra 2025-2029 untuk indikator sebagai berikut:

- a. Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni Melalui Pembangunan Baru.

Indikator ini menghitung jumlah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat melalui kegiatan pembangunan baru rumah untuk korban bencana/relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tabel 3.1  
Target Penyedian Baru Rumah Layak Huni bagi Warga yang terdampak Korban



Bencana dan atau Relokasi Program Pemerintah								
No	Uraian	Baseline 2024	Periode					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	0	2	1	1	1	1	1
2	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	0	1	1	1	1	1
	Jumlah	0	2	2	2	2	2	2

b. Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni Melalui Peningkatan Kualitas.

Indikator ini menghitung jumlah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Perbaikan rumah tidak layak huni dan fasilitasi rumah sewa untuk korban bencana/relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Perbaikan rumah tidak layak huni untuk masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan serta di luar kawasan kumuh melalui Bantuan Simulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BSPKRLTH).

Tabel 3.2  
Target Penyedian Rumah Layak Huni bagi Warga yang terdampak Korban Bencana melalui Rehabilitasi dan Fasilitasi Penyediaan Rumah

No	Indikator	Satuan	Base line 2024	Periode					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	0	4	3	5	5	5	5
2	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Rumah Tangga	0	8	8	6	6	6	6
		Total	0	12	11	11	11	11	11

Tabel 3.3  
Rencana Penyediaan Rumah Layak Huni melalui BSPKRTLH Tahun 2025-2030

No	Uraian	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Target BSPRTLH di Dalam Kawasan Permukiman Kumuh	0	0	50	50	50	50
2	Target BSPRTLH di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	100	151	100	150	200	400
	Jumlah	100	151	150	200	250	450

c. Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni Melalui Penyediaan Unit Hunian Vertikal Yang Terpadu.

Indikator ini menghitung jumlah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat melalui kegiatan penyedian rumah susun. Terdapat 9 (sembilan) tower rumah susun sewa Kota Balikpapan dengan jumlah hunia masing-masing sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Penyediaan Hunian Rumah Susun Sewa (Rusunawa)**  
**Kota Balikpapan**

NO	RUSUNAWA	JUMLAH HUNIAN	JUMLAH TERISI	SISA HUNIAN	PERSENTASE
1	Damai	50	50	0	100.00
2	Sepinggan 1	72	72	0	100.00
3	Sepinggan 2	68	45	23	66.18
4	Km 7	96	89	7	92.71
5	Siaga	96	91	5	94.79
6	Manggar	94	32	62	34.04
7	Somber	96	74	22	77.08
8	Perusda 1	96	79	17	82.29
9	Perusda 2	84	74	10	88.10
		752	606	146	80.59

Sumber Data: UPTD Rusunawa

**3.1.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Sasaran Strategis (SS) merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balipapan sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balipapan menjabarkan 2 (dua) Sasaran Strategis yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balipapan periode 2025 – 2029.

Adapun 2 (dua) Sasaran Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balipapan yaitu:

- a. Sasaran Strategis (SS) 1, yaitu **“Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan”**.

**Indikator sasaran strategis sasaran I adalah sebagai berikut:**

### **1. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan.**

Adapun rumusan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Jumlah rumah tangga bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak)

$$\text{PHLTB (proksi)} = \frac{\text{JRTHLTB (proksi)}}{\text{JRTHLTB (proksi)}} \times 100\%$$

- JRTHLTB (proksi): Jumlah rumah tangga dengan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan.
- JRT: Jumlah total rumah tangga seluruh kota Balikpapan

Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan, sehingga pengukuran dengan mengukur jumlah rumah tangga se-kota Balikpapan yang layak huni, terjangkau dan berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud dengan:

1. Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/ sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makan dari satu dapur, selanjutnya yang dimaksud makan dari satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama-sama menjadi satu Rumah tangga. Dalam rumusan ini jumlah rumah tangga se Kota Balikpapan sama dengan jumlah rumah yang dihuni di Kota Balikpapan, dengan asumsi 1 (satu) hunian 1 (satu) rumah tangga.
2. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:
  - a. kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m<sup>2</sup> per kapita (sufficient living space);
  - b. memiliki akses terhadap air minum layak;
  - c. memiliki akses terhadap sanitasi layak;
  - d. ketahanan bangunan (durable housing), yaitu atap terluas berupa beton/ genteng/ seng/ kayu/ sirap; dinding terluas berupa tembok/ plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/ granit/ keramik/ parket/vinil/karpet/ ubin/tegél/teraso/ kayu/papan/ semen/bata merah.
3. Rumah terjangkau adalah rumah dengan harga jual atau harga sewa yang mampu dimiliki atau disewa oleh seluruh lapisan masyarakat;
4. Rumah yang layak huni dan terjangkau adalah rumah yang memenuhi persyaratan

keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

5. Berkelanjutan adalah memenuhi persyaratan tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.

Adapun jumlah Rumah tidak Layak Huni Kota Balikpapan sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Rekapitulasi Hunian RTLH Status Dihuni Dan Tidak Dihuni**

KECAMATAN/KELURAHAN	STATUS HUNIAN RTLH		Grand Total
	Dihuni	tidak dihuni	
Balikpapan Barat	1,432	56	1,488
Baru Ilir	10	1	11
Baru Tengah	35		35
Baru Ulu	919	11	930
Kariangau	75		75
Marga Sari	14		14
Margomulyo	379	44	423
Balikpapan Kota	1,242		1,242
Damai	199		199
Klandasan Ilir	406		406
Klandasan Ulu	255		255
Prapatan	170		170
Telaga Sari	212		212
Balikpapan Selatan	684	1	685
Damai Bahagia	86		86
Damai Baru	4		4
Gunung Bahagia	10	1	11
Sepinggan	122		122
Sepinggan Baru	49		49
Sepinggan Raya	327		327
Sungai Nangka	86		86
Balikpapan Tengah	1,716	47	1,763
Gunung Sari Ilir	344	12	356
Gunung Sari Ulu	227	7	234
Karang Jati	354	6	360
Karang Rejo	633	19	642
Grand Total	5,656	190	5,846

2. Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) Memadai.

Adapun formulasi indikator ini adalah sebagai berikut:

Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU sampai dengan tahun N

----- X100%

Terget jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU selama periode Renstra Tahun 2025-2029

Se

dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 9 Tahun 2009 bahwa prasarana, sarana, utilitas umum (PSU) perumahan paling sedikit terdiri dari:

- 1) Jalan
- 2) Ruang Terbuka Hijau
- 3) Sanitasi
- 4) Air Minum
- 5) Rumah Ibadah
- 6) Jaringan Listrik
- 7) Penerangan Jalan Umum

Jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU perumahan adalah kawasan dengan jumlah rumah 10 s.d 1000 rumah.

- b. Sasaran Strategis (SS) 2, yaitu Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu “**Nilai AKIP Perangkat Daerah**”.

Adapun rumusan perhitungannya adalah Nilai Hasil Evaluasi penerapan SAKIP yang meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Nilai diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dalam periode 2024-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 6  
Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman  
Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN											
- Meningkatkan infrastruktur infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perumahan dan Permukiman (Indeks)	0,1	0,14	0,27	0,44	0,62	0,79	1	
		Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	97,25	97,29	97,37	97,44	97,54	97,66	97,88	
		Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) Memadai (%)	16,42	25,37	40,3	55,22	70,15	85,07	100	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANG AN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	74,25	76,14	79	80	81	82	83	

**3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Strategi merupakan upaya atau langkah yang berisi program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi yang mendeskripsikan cara tujuan dan sasaran akan dicapai selanjutnya diperjelas dengan arah kebijakan. Perumusan strategi didapat dari memperhatikan masalah yang telah dirumuskan dalam isu strategis. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden RI dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah, maka Dinas Perumahan dan Permukiman merumuskan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini bertujuan untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau, Khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan kawasan permukiman yang berkelanjutan. Strategi pelaksanaan difokuskan pada penguatan sinergi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat dengan memberikan fasilitasi skema pembiayaan yang inklusif dan inovatif serta integrasi pembangunan perumahan dengan penataan kawasan yang dilengkapi infrastruktur dasar, ruang terbuka hijau, dan akses terhadap layanan publik.

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan juga menekankan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan rumah yang ramah lingkungan, adaptif terhadap perubahan iklim, serta memperhatikan kebutuhan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat terdampak bencana. Dengan pendekatan menyeluruh ini, program 3 juta rumah diharapkan menjadi motor penggerak transformasi sektor perumahan dan kawasan permukiman, yang tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menciptakan lingkungan hidup yang aman, sehat, dan inklusi bagi seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan mempunyai Strategi Pembangunan Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

**Tabel 3.7**

**Strategi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**



No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Memberi bantuan penyediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru dan peningkatan kualitas
			Meningkatkan rumah layak huni melalui penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas,
			Mendorong penyediaan hunian vertikal di kawasan perkotaan
			Mendorong penyediaan perumahan berkelanjutan
			Memberikan fasilitasi dan mendorong skema pembiayaan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan MBR yang telah ada
			Mengurangi luasan kawasan permukiman kumuh
			Mencegah berkembang dan tumbuhnya kawasan permukiman baru kumuh baru
			Meningkatkan peran perangkat daerah terkait pelaksanaan program urusan perumahan dan permukiman
			Memanfaatkan basis data PKP
			Meningkatkan kemudahan penyelenggaraan PKP
			Meningkatkan pelayanan Unit Pelaksana Teknis Rusunawa
			Meningkatkan kolaborasi dalam penyelenggaraan PKP
			Optimalisasi peran dan fungsi Kelompok Kerja (Pokja) dan forum PKP
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas	Meningkatkan pelaksanaan Pengawasan Intern (SPIP)

		Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatkan layanan pengelolaan perencanaan dan penganggaran
			Meningkatkan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

Strategi Pembangunan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dilaksanakan berupa penahapan pembangunan, yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8

Penahapan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2025-20230

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penataan Lahan Pengembangan Perumahan ASN km.7.5	Pembangunan Perumahan ASN Km. 7.5	Penyediaan PSU Perumahan ASN Km. 7.5	Pemasaran Unit Hunian	Perumahan ASN Km. 7.5 dapat dihuni oleh ASN
Penyusunan , Kajian dan dokumen analisis Pembangunan Perumahan Vertikal Berbasis Kepemilikan (Rusunami ASN)	1. menyusun DPPT (Dokumen perencanaan pengadaan Tanah) masuk Pertek dan PKKPR 2. Penyusunan Feasibility,	Proses pengadaan tanah	1. Proses pengadaan tanah 2. Penyusunan DED Pembangunan Perumahan Vertikal Berbasis Kepemilikan (Rusunami ASN)	Pembangunan Perumahan Vertikal Berbasis Kepemilikan (Rusunami ASN)
Relokasi untuk warga yang terdampak Korban bencana/program pemerinatah - Terdapat 9 lokasi untuk untuk relokasi berdasarkan hasil kajian tahun 2022, 1. penyusunan FS 2. melakukan proses sosialisasi terhadap calon penerima layanan	1. menyusun DPPT (Dokumen perencanaan pengadaan Tanah) masuk Pertek dan PKKPR 2. sosialisasi ke pemilik lahan untuk menuju ke Penlok, termasuk tim persiapan (terdapat 2 skala untuk pengadaan tanah terkait luasan ) 3. Masuk ke penetapan lokasi	1. Pelaksanaan Pengadaan Tanah bersama Tim Pemerintah Kota yang kurang dari 5 Ha dan menggunakan panitia Pengadaan Tanah jika diatas 5 Ha (masuk apraisal/penilaian lahan secara tersendiri , biasanya meminta zonasi) 2.Proses Pengadaan Tanah , sudah terdapat nilai lahan yang akan dibebaskan	1. Masih proses pengadaan tanah 2. Pembayaran lahan kepada pemilik lahan 3. Pemagaran atau pengamanan aset	Penyiapan Kasiba
1. Identifikasi lahan untuk pembangunan gedung Rusunawa Baru (untuk MBR) 2. Penyusunan dokumen kajian pembangunan Rusunawa Baru (untuk MBR) 3. Penyiapan persyaratan pengajuan Rusunawa Baru (untuk MBR)	1. Menyusun DPPT (Dokumen perencanaan pengadaan Tanah) masuk Pertek dan PKKPR 2. Masuk ke penetapan lokasi 3. Pengadaan lahan	1. Proses Pengadaan Tanah 2. Pengajuan ke pusat untuk Pembangunan Rusunawa Baru (untuk MBR)	Pembangunan Rusunawa Baru (untuk MBR)	1. Pemasaran Rusunawa Baru (untuk MBR) 2. Rusunawa sudah dapat di huni
Penuntasan kumuh berdasarkan SK kumuh tahun 2023	Penanganan Kawasan permukiman	Penanganan Kawasan permukiman Kumuh Kawasan Pesisir	Penanganan Kawasan permukiman	1. Penanganan Kawasan permukiman

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
dengan target penanganan kumuh 38 Ha	Kumuh Kawasan Pesisir Kelurahan Baru Ulu, Marga Sari, Baru Tengah	Kelurahan Klandasan Ulu, Manggar dan Manggar Baru	Kumuh Kawasan Non Pesisir Kelurahan Muara Rapak dan Karang Rejo	Kumuh Kawasan Non Pesisir Kelurahan Prapatan, Sungai Nangka dan Damai Bahagia 2. Penanganan Kawasan permukiman Kumuh Non Pesisir Kelurahan Damai Bahagia
Penuntasan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di luar kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha sebanyak 151 unit berdasarkan target Renstra Disperkim 2021-2026	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 400 unit dengan rincian di dalam kawasan kumuh di bawah 10 Ha sebanyak 100 unit dan di luar kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha sebanyak 150 unit	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 400 unit dengan rincian di dalam kawasan kumuh di bawah 10 Ha sebanyak 150 unit dan di luar kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha sebanyak 150 unit	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 400 unit dengan rincian di dalam kawasan kumuh di bawah 10 Ha sebanyak 200 unit dan di luar kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha sebanyak 150 unit	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 400 unit dengan rincian di dalam kawasan kumuh di bawah 10 Ha sebanyak 100 unit dan di luar kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha sebanyak 150 unit
1. Penyerahan 10 PSU Perumahan 2. Penyelenggara an PSU Perumahan formal yang PSU nya sudah diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan dan perumahan yang merupakan aset Pemerintah Kota Balikpapan	1. Penyerahan 10 PSU Perumahan 2. Penyelenggara an PSU Perumahan formal yang PSU nya sudah diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan dan perumahan yang merupakan aset Pemerintah Kota Balikpapan 3. PSU kawasan perumahan swadaya	1. Penyerahan 10 PSU Perumahan 2. Penyelenggara an PSU Perumahan formal yang PSU nya sudah diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan dan perumahan yang merupakan aset Pemerintah Kota Balikpapan 3. PSU kawasan perumahan swadaya	1. Penyerahan 10 PSU Perumahan 2. Penyelenggara an PSU Perumahan formal yang PSU nya sudah diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan dan perumahan yang merupakan aset Pemerintah Kota Balikpapan 3. PSU kawasan perumahan swadaya	1. Penyerahan 10 PSU Perumahan 2. Penyelenggara an PSU Perumahan formal yang PSU nya sudah diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan dan perumahan yang merupakan aset Pemerintah Kota Balikpapan 3. PSU kawasan perumahan swadaya
Perencanaan pengadaan tanah untuk TPU 1. penyusunan FS 2. melakukan proses sosialisasi	1. menyusun DPPT (Dokumen perencanaan pengadaan Tanah) masuk Pertek dan PKKPR 2. sosialisasi ke pemilik lahan untuk menuju ke Penlok, termasuk tim persiapan (terdapat 2 skala untuk pengadaan tanah terkait luasan ) 3. Masuk ke penetapan lokasi	1. Pelaksanaan Pengadaan Tanah bersama Tim Pemerintah Kota yang kurang dari 5 Ha dan menggunakan panitia Pengadaan Tanah jika diatas 5 Ha (masuk apraisal/ penilaian lahan secara tersendiri , biasanya meminta zonasi) 2. Proses Pengadaan Tanah , sudah terdapat nilai lahan yang akan dibebaskan	1. Masih proses pengadaan tanah 2. Pembayaran lahan kepada pemilik lahan 3. Pemagaran atau pengamanan aset	1. Penyiapan Kasiba

3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan disusun berdasarkan arah kebijakan Kota Balikpapan dalam RPJMD Kota Balikpapan. Arah kebijakan tersebut akan menjadi acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan utama Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan. Adapun rumusan arah kebijakan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9  
Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman

Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
Dukungan infrastruktur yang berkualitas	1. Penguatan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian dan pusat - pusat pertumbuhan baru.	Fasilitasi Pembangunan hunian vertikal untuk ASN dan MBR	1. Pemeliharaan dan operasional serta penyediaan PSU Rumah ASN dan Rumah susun Sewa (Rusunawa) untuk MBR 2. Penguatan kelembagan Rusunawa
		Pengembangan perumahan dengan konsep "Hijau"	Penyediaan ruang terbuka hijau dan kecukupan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) perumahan
		Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan, Operasional dan Pemeliharaan , perbaikan dan penyediaan PSU Perumahan
		Pembinaan terhadap pelaku pembangunan	Sosialisasi terkait pengembangan perumahan yang sesuai ketentuan kepada pengembang
	3. Penataan pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni yang berketahanan	Penyediaan perumahan bagi masyarakat terdampak bencana dan program relokasi pemerintah	Pembangunan dan Rehabilitasi serta fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat terdampak bencana dan program relokasi pemerintah
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Pemberian Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi MBR
		Peningkatan kualitas permukiman	1. Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh, 2. Pemukiman Kembali dalam rangka Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh, 3. Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh, 4. Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah dilakukan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali 5. Pengelolaan kawasan permukiman berbasis swadaya masyarakat

			6. Pengelolaan kawasan permukiman berbasis tematik berkelanjutan 7. Penguatan kerja sama Pentahelix dalam penyelenggaraan PKP 8. Penguatan kelembagaan Pokja dan forum PKP 9. Restrukturisasi regulasi tata kelola penyelenggaraan PKP
		Pengembangan sistem informasi dan basis data PKP	Sistem Informasi perumahan dan permukiman

**BAB IV**

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**4.1 Program Perangkat Daerah**

Salah satu agenda prioritas yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 Pemerintah Kota Balikpapan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah dukungan terkait program unggulan Lingkungan Hidup & Sosial yang Sehat dan Nyaman, sehingga untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasional program lima tahun dari Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 ke dalam program-program prioritas. Penetapan program bertujuan untuk mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran sesuai dengan arah kebijakan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan. Selanjutnya untuk melaksanakan program-program tersebut maka didukung oleh kegiatan dan dijabarkan ke sub kegiatan.

Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun urusan yang diampu adalah Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan kode 1.04.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dari program pembangunan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, fokus program pembangunandisajikan hingga tahun 2025-2030, dimana tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan yaitu pijakan penyusunan renja perangkat daerah tahun 2030. Adapun Program prioritas pembangunan perencanaan daerah Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2025-2029 pada urusan perumahan dan kawasan permukima serta program pendukungnya, adalah sebagai berikut:

**a. Program Priroritas Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan**

Program prioritas dilaksanakan berdasarkan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah yang mengacu pada Program Prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan 2025- 2029, oleh karena itu program-program prioritas yang mendukung tugas dan fingsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) 1.04.02 - Program Pengembangan Perumahan

Program ini mempunyai sasaran kinerja terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah Kabupaten/Kota, dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:

- a. Program Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni”, dengan rumusan formulasi perhitungannya adalah jumlah warga negara korban bencana yang mendapat layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah layak huni sampai dengan tahun N / jumlah rencana warga negara yang akan mendapat layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah layak huni periode renstra tahun 2025-2029 dikalikan 100%.

Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang  
mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan  
rehabilitasi  
rumah                      smapai                      dengan                      tahun-N  
-----x100%  
Jumlah total rencana warga negara korban bencana  
kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun periode renstra  
tahun 2025-2029

- b. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Pemerintah kabupaten/kota memperoleh program Daerah yang fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni, dengan rumusan formulasi perhitungannya adalah jumlah warga negara terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan fasilitas penyediaan rumah layak huni sampai dengan tahun-N dibagi jumlah total rencana warga negara terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan ditangani pada periode renstra tahun 2025-2029 dikalikan 100%.

Jumlah warga negara terkena relokasi program kabupaten/kota  
yang mendapatkan layanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni  
sampai                      dengan                      tahun-N  
-----x100%  
Jumlah total rencana warga negara terkena relokasi program  
kabupaten/kota yang akan ditangani yang akan ditangani tahun  
periode renstra tahun 2025-2029

- c. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal, dengan rumusan formulasi perhitungannya adalah jumlah penyediaan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal sampai dengan tahun N dibagi jumlah rencana penyediaan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal selama periode renstra 2025-2029 dikalikan 100%.

$\frac{\text{Jumlah warga negara terkena relokasi program kabupaten/kota yang mendapatkan layanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni sampai dengan tahun-N}}{\text{Jumlah rencana penyediaan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal selama periode renstra 2025-2029 dikalikan}} \times 100\%$
--

2) 1.04.03 - Program Kawasan Permukiman

Program ini mempunyai sasaran kinerja meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh, dengan indikator kinerja, yaitu: Presentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di Kab/Kota yang ditangani, dengan rumusan formulasi perhitungannya adalah Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani sampai dengan tahun N (ha) dibagi Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh dibawah 10 yang ditangani selama periode renstra 2025-2029 dikalikan 100%.

$\frac{\text{Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani sampai dengan tahun N}}{\text{Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani selama periode renstra 2025-2029}} \times 100\%$
---

3) 1.04.04 - Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini mempunyai sasaran kinerja Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman diluar Kawasan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, dengan indikator kinerja, yaitu Presentase Pemenuhan rumah layak huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dan rumus formulasi perhitungannya adalah jumlah unit rumah tidak layak huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani sampai dengan tahun N dibagi Jumlah rumah yang tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh dikalikan 100%

4) 1.04.05 - Program

Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini mempunyai sasaran kinerja meningkatnya penyediaan PSU perumahan, dengan indikator kinerja, yaitu: Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) memadai dengan formulasi rumusan perhitungannya adalah realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU memadai sampai dengan tahun N dibagi jumlah rencana target perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU yang memadai selama periode renstra 2025-2029 dikalikan 100%

Jumlah rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh ang ditangani sampai dengan tahun N

-----x100%

Jumlah rumah yang tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh selama periode renstra 2025-2029

S Sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2029, bahwa Perumahan adalah kawasan dengan jumlah rumah 15 s.d. 1.000 rumah. PSU Perumahan paling sedikit terdiri dari:

- a. jalan;
- b. ruang terbuka hijau;
- c. sanitasi
- d. air minum;
- e. rumah ibadah;
- f. jaringan listrik; dan
- g. penerangan jalan umum.

PSU Perumahan adalah PSU yang melayani satu lingkungan perumahan yang terintegrasi dengan sistem atau jaringan perkotaan. Yang termasuk PSU Perumahan adalah

1) Prasarana perumahan antara lain:

- a. jaringan jalan,
- b. jaringan saluran pembuangan air hujan atau drainase,
- c. penyediaan air minum,
- d. saluran pembuangan air limbah atau sanitasi, dan
- e. prasarana dan sarana

2) Sarana perumahan antara lain:

- a. sarana perniagaan,
- b. sarana pelayanan umum.

5) 1.04.06 - Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Realisasi jumlah perumahan dengan PSU Perumahan yang sudah diserahkan ke Pemerintah Kota sampai dengan tahun N

-----x100%

Jumlah rencana target perumahan dengan PSU Perumahan yang sudah diserahkan ke Pemerintah Kota selama periode renstra 2025-2029 dikalikan 100%



Program ini mempunyai sasaran kinerja meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan kecil, dengan indikator kinerja, yaitu: Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU, dengan formulasi rumusan perhitungannya adalah Jumlah orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum dengan tingkat kemampuan kecil yang tersertifikasi dan teregistrasi dibagi jumlah orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum dengan tingkat kemampuan kecil dikali 100%.

Jumlah orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum yang tersertifikasi dan teregistrasi

-----x100%

Jumlah orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum dikali 100%

**b. Program Pendukung Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan**

Program pendukung adalah program Perangkat Daerah yang menunjang pelaksanaan program prioritas (Urusan Wajib). Program pendukung Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2025-2029 adalah X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sasaran kinerja meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dan infikator kinerjanya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah dengan rumusan formulasi perhitungannya adalah Nilai IKM perangkat daerah.

**Skor nilai hasil survey Kepuasan Masyarakat**

**4.2 Kegiatan Perangkat Daerah**

Selanjutnya untuk melaksanakan program-program tersebut maka didukung oleh kegiatan-kegiatan dan dijabarkan ke sub kegiatan. Adapun kegitan-kegitan yang mendukung program Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1  
**Kegitan-Kegitan yang mendukung Program Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2025-2030**

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>				
1.	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.01.0002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
			1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	
			1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
			1.04.02.2.01.0008 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.02.0001 - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	
			1.04.02.2.02.0004 - Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	
			1.04.02.2.02.0007 - Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.02.0008 - Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.04.02.2.02.0009 - Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	
			1.04.02.2.02.0010 - Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	
			1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
			1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
			1.04.02.2.03.0007 - Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.03.0008 - Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
			1.04.02.2.06.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	
			1.04.02.2.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
			1.04.02.2.06.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	
			1.04.02.2.06.0005 - Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			1.04.02.2.06.0006 - Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.04.02.2.07 - Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	
			1.04.02.2.07.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	
2.	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh	1.04.03.2.01 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	
			1.04.03.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	
			1.04.03.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	
			1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
			1.04.03.2.02.0012 - Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	
			1.04.03.2.02.0015 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	
			1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
			1.04.03.2.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
			1.04.03.2.03.0007 - Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	
			1.04.03.2.03.0009 - Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.04.03.2.03.0010 - Fasilitas Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
			1.04.03.2.03.0014 - Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali	
3.	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman diluar kawasan permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
			1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.04.2.01.0008 - Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	
			1.04.04.2.01.0009 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
4.	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU perumahan	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
			1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
			1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
			1.04.05.2.01.0006 - Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.04.05.2.01.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
			1.04.05.2.01.0009 - Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	
			1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	
			1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
			1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
5	1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan kecil	1.04.06.2.01 - Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	
			1.04.06.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	
6	1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			1.04.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			1.04.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			1.04.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			1.04.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			1.04.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			1.04.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			1.04.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			1.04.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			1.04.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.04.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			1.04.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			1.04.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



4.3 Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah.

Adapun pemetaan tujuan, sasaran, outcome, output, indikator program, kegiatan dan sub kegiatan sub kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2025-2030 secara keseluruhan sebagai berikut:

Tabel 4.2  
Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Kinerja serta Indikator

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN							
- Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan				Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perumahan dan Permukiman (Indeks)		
		Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan			persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)		
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program		Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			pemerintah Kabupaten/Kota				
					Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Kota yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
					Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni Melalui Penyediaan Unit Hunian Vertikal (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
			Persentase rumah tangga yang berpotensi terdampak bencana di kawasan rawan bencana, mengalami bencana di kawasan bencana dan rencana relokasi program pemerintah kota		Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	1.04.02.2.01.0002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
					Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan	1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
					Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.02.2.01.0008 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Persentase masyarakat yang mengikuti Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)	1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)	1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang)	1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Orang)	1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	1.04.02.2.02.0001 - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	
					Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)	1.04.02.2.02.0004 - Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	
					Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Orang)	1.04.02.2.02.0007 - Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	1.04.02.2.02.0008 - Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)	1.04.02.2.02.0009 - Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang)	1.04.02.2.02.0010 - Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	
				Persentase pelaksanaan pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
					Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
					Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.02.2.03.0007 - Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.02.2.03.0008 - Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	
				Persentase Pemenuhan penerbitan Rekomendasi Perizinan Rencana Tapak	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
					Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan (Dokumen)	1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum (Laporan)	1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara (Sistem Informasi)	1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
					Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1.04.02.2.06.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	1.04.02.2.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum (Laporan)	1.04.02.2.06.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara (Sistem Informasi)	1.04.02.2.06.0005 - Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
					Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan (Dokumen)	1.04.02.2.06.0006 - Fasilitas Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) (Laporan)	1.04.02.2.07 - Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) (Laporan)	1.04.02.2.07.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani (%)	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
				Persentase fasilitasi pengendalian pelaksanaan pembangunan dan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.03.2.01 - Penerbitan Izin Pembangunan dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				pegembangan kawasan Permukiman	melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum (Laporan)	Pengembangan Kawasan Permukiman	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (Laporan)	1.04.03.2.01 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (Laporan)	1.04.03.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum (Laporan)	1.04.03.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	
				Presentase Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalis asi (Dokumen)	1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina (Kelompok Masyarakat)	1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
					Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina (Kelompok Masyarakat)	1.04.03.2.02.0012 - Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	
					Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.03.2.02.0015 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	
				Presentase Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Hektar)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan)	1.04.03.2.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
					Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.03.2.03.0007 - Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	
					Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha)	1.04.03.2.03.0009 - Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga)	1.04.03.2.03.0010 - Fasilitas Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
					Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Hektar)	1.04.03.2.03.0014 - Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan /Permukiman Kembali	
			Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman diluar kawasan permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha		Presentase Pemenuhan rumah layak huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (%)	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Orang)	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Orang)	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Orang)	1.04.04.2.01.0008 - Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Orang)	1.04.04.2.01.0009 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
		Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan			Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) Memadai (%)		
			Meningkatnya penyediaan PSU perumahan		Persentase Perumahan dengan PSU yang sudah diserahkan ke Pemerintah Kota (%)	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
				Presentase Unit Rumah terfasilitasi PSU yang sudah Diserahkan Ke	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan (Dokumen)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Pemerintah Kota Balikpapan			
					Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU (Kelompok)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
					Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU (Kelompok)	1.04.05.2.01.0006 - Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	
					Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.2.01.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan (Dokumen)	1.04.05.2.01.0009 - Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	
					Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
					Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
			Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan kecil		Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (%)	1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan)	1.04.06.2.01 - Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Tingkat Kemampuan Kecil	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan)	1.04.06.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya indikator kinerja yang relevan, terukur dan selaras dari tingkat individu hingga organisasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.04.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.04.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.04.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi  Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.04.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
- Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah Kabupaten/Kota		Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
					Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Kota yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
					Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni bagi MBR melalui Fasilitas Rumah Susun (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				persentase tingkat kelayakan bangunan hunian rumah susun sewa	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Laporan)	1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
					Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					(Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal))		
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Laporan)	1.04.02.2.05.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
					Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal))	1.04.02.2.05.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung beserta target kinerja, indikator serta pagu indikatif Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2025-2030 secara keseluruhan sebagaimana terlampir dalam lampiran I.

4.4 Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Berikut sub kegiatan dalam mendukung program prioritas Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2025-2030, yaitu:

Tabel 4.3

Sub Kegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2025-2030

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				
1.	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.01.0002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
			1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	
			1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
			1.04.02.2.01.0008 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.02.0001 - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	
			1.04.02.2.02.0004 - Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	
			1.04.02.2.02.0007 - Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				
			1.04.02.2.02.0008 - Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.02.0009 - Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	
			1.04.02.2.02.0010 - Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	
			1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
			1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
			1.04.02.2.03.0007 - Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.03.0008 - Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
			1.04.02.2.06.0001 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	
			1.04.02.2.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
			1.04.02.2.06.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	
			1.04.02.2.06.0005 - Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			1.04.02.2.06.0006 - Fasilitas Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>				
			1.04.02.2.07 - Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	
			1.04.02.2.07.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	
2.	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh	1.04.03.2.01 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	
			1.04.03.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	
			1.04.03.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	
			1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
			1.04.03.2.02.0012 - Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	
			1.04.03.2.02.0015 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	
			1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
			1.04.03.2.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
			1.04.03.2.03.0007 - Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	
			1.04.03.2.03.0009 - Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	
			1.04.03.2.03.0010 - Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>				
			1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
			1.04.03.2.03.0014 - Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali	
3.	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman diluar kawasan permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
			1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.04.2.01.0008 - Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	
			1.04.04.2.01.0009 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
4.	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU perumahan	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
			1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
			1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
			1.04.05.2.01.0006 - Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	
			1.04.05.2.01.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
			1.04.05.2.01.0009 - Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	
			1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				
			1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
			1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	

**4.5 Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pemerintah daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut. Secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja sasaran.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, serta mendukung pencapaian sasaran kinerja utama pembangunan Kota Balikpapan dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2030, maka Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan menetapkan 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran Strategis. Setiap Sasaran Strategis memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta target kinerja yang akan dicapai pada kurun waktu 2025 – 2029. sebagai berikut

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Tujuan dan Kinerja Utama

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE  LINE 2024	TARGET TAHUN						KETER ANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN											
- Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perumahan dan Permukiman (Indeks)	0,1	0,14	0,27	0,44	0,62	0,79	1	
		Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	97,25	97,29	97,37	97,44	97,54	97,66	97,88	
		Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan	16,42	25,37	40,3	55,22	70,15	85,07	100	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETER ANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			Utilitas Umum) Memadai (%)								
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	74,25	76,14	79	80	81	82	83	

**4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah. IKK tingkat dampak (*impact*) merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran RPD, serta indikator kinerja tujuan dan sasaran RPD, serta indikator kinerja tujuan dan sasaran seluruh Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya, indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat hasil (*outcome*) yang digunakan untuk menggambarkan target kinerja program dan target kinerja LPPD serta indikator *SDG’S*. Berikut Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2025-2030:

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan**  
**Tahun 2025-2030**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASE  LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERA  NGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
2.	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perumahan dan Permukiman	positif	Indeks	0.1	0,14	0,26	0,43	0,61	0,78	1,00	Indikator tujuan
3.	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) Memadai	positif	%	16,42	25,37	40,30	55,22	70,15	85,07	100,00	iku

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASE  LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERA  NGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
4.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	positif	Nilai	74,25	76,14	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	iku
5.	persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	positif	%	97,25	97,29	97,37	97,44	97,54	97,66	97,88	iku
6.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	positif	%	0,00	0,00	25,77	41,41	60,25	77,23	100,00	indikator program
7.	Persentase Perumahan dengan PSU yang sudah	positif	%	16,42	25,37	40,30	55,22	70,15	85,07	100,00	indikator program



NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASE  LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERA  NGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	diserahkan ke Pemerintah Kota										
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	positif	Indeks	84,02	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	indikator program
9.	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	positif	%	52.44	69,51	75,61	81,71	87,80	93,90	100,00	indikator program

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASE  LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERA  NGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
10.	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	positif	%	0,00	15,49	32,39	49,30	66,20	83,10	100,00	indikator program
11.	Presentase Pemenuhan rumah layak huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	positif	%	7,17	15,60	28,33	36,76	49,41	66,27	100,00	indikator program
12.	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Kota yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan	positif	%	0,00	0,00	11,11	33,33	55,56	77,78	100,00	indikator program

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASE  LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERA  NGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	Rumah Layak Huni										
13.	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni Melalui Penyediaan Unit Hunian Vertikal	positif	%	80,00	83,38	86,76	90,14	95,51	96,89	100,00	indikator program
14.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	positif	%	7,14	14,28	25,05	35,76	50,04	67,88	100	IKK
15.	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah	positif	%	67,11	68,00	69,00	70,00	71,00	72,00	73,00	SDG

[illegible]

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman merupakan pilar penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan. Mengacu pada RPJMN 2025 – 2029, penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan diarahkan tidak hanya untuk mengurangi *backlog* perumahan, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat melalui pembangunan permukiman yang sehat, aman, dan terintegrasi dengan infrastruktur dasar. Selain itu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga menegaskan agar Pemerintah Daerah mendukung target nasional berupa pembangunan dan renovasi 3 juta rumah, dengan fokus pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta peningkatan kualitas kawasan permukiman di wilayah perkotaan dan perdesaan. Upaya ini dijalankan melalui penguatan peran kelembagaan, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan skema pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman bagi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025- 2029 yang mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan 2025-2029.

Keberhasilan pelaksanaan program prioritas pembangunan ini sangat bergantung pada sinergi, kolaborasi, koordinasi dan komunikasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Kota Balikpapan, Pemerintah Provinsi, kementerian/lembaga lain, pengembang perumahan, masyarakat, organisasi sosial, akademisi/pemerhati bidang perumahan dan permukiman, serta seluruh *stakeholders* lainnya, dengan secara konsisten dan terus berkomitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur perumahan dan permukiman yang sebaik-baiknya, maka akan terwujud hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, semoga dapat menjadi pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam jangka menengah tahun 2025-2029 dan menghasilkan outcome yang berkualitas.



## E. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### 1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui *feedback* yang sistematis.

Penyusunan renstra tentunya memiliki fungsi bagi sebuah organisasi. Pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi dan program-program strategi akan memberikan arahan yang tepat mana saja metode-metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan baik, sebagai dasar penilaian SAKIP.

Sebagai alat manajemen yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, Penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus melibatkan *stakeholder* sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berkoordinasi dengan Bappeda. Selanjutnya, Renstra Perangkat Daerah ditetapkan melalui peraturan Kepala OPD. Dokumen Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan Kepala OPD agar disampaikan ke Bappeda.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan

Bencana (BNPB) yang menjadi penanggungjawab sekaligus pengendali penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat, sedangkan untuk tingkat daerah ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi maupun BPBD Kota, dimana hubungan kerja antara BNPB dan BPBD bersifat koordinasi, komando dan pelaksana teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana selaras dengan Pembukaan Undang-Undang Tahun 1945 alinea ke empat yang berbunyi, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Disamping itu berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah membawa konsekuensi Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah dan dokumen pengelolaan keuangan daerah, serta mengacu pada Kepmendagri No.900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi



dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disusun secara sistematis meliputi Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi landasan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), meliputi Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan sesuai dengan penggolongan, kode dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah untuk pembangunan kurun waktu lima tahun mendatang.

Maka dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan Rencana Perencanaan Strategi Organisasi Perangkat Daerah tetap harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan.

Melalui Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dan aktif dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kota Balikpapan memasuki tahap pertama di dalam rangkaian pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045. Tahap pertama ini merupakan tahapan krusial karena menentukan agenda transformasi pembangunan untuk 20 tahun mendatang. Visi pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan, yaitu **“Balikpapan Nyaman untuk Semua 2045: Superhub Industri dan Jasa yang Maju dan Berkelanjutan dengan Semangat Madinatul Iman”**. Visi tersebut salah satunya diwujudkan melalui agenda pembangunan tahap pertama yang memiliki

tema berupa “Penguatan Fondasi Transformasi: Balikpapan Kota Cerdas dan Kolaboratif .

BPBD Kota Balikpapan Mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Balikpapan 2025-2029 dimana arah pembangunan Kota Balikpapan berdasarkan Visi Walikota Terpilih adalah **“Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman”** keterkaitan BPBD Kota Balikpapan pada RPJMD Kota Balikpapan 2025-2029, yaitu dengan Tujuan **Meningkatnya Ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dan kebakaran “** dengan indikoator Indeks Ketahanan Daerah dan Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan kebakaran”

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan adalah :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4723);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran;
16. Kepmendagri No.050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan;
18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
20. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
21. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Uraian

- Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
22. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Penanggulangan Bencana Daerah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1 Maksud**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan periode 2025 – 2029 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah yang akan dipedomani dalam menentukan tujuan, strategi, kebijakan, untuk kemudian diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi serta sebagai implementasi dalam mendukung visi dan misi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Balikpapan dan bersifat indikatif Serta Kajian Resiko Bencana.

Penyusunan Renstra bertujuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJMD 2025 – 2029 serta menyediakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam :

- a) Menjamin adanya konsistensi perencanaan pembangunan yang telah/ akan direncanakan sehingga dokumen perencanaan OPD harus mengacu kepada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan; dan
- b) Memberikan arahan dan pedoman bagi OPD dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 2025-2029.

Menjadi tolak ukur penilaian pertanggungjawaban Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan kepada Walikota Balikpapan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman dalam menyusun alokasi APBD Kota Balikpapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota dan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, sebagai tolak ukur kinerja Tujuan, Sasaran - Sub kegiatan PD dalam menjalankan kinerja selama 5 tahun dan sebagai pedoman pembuat dokumen turunan seperti Renja.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan adalah, sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini menguraikan tentang latar belakang dan landasan hukum disusunnya Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan. Selanjutnya diuraikan pula tentang maksud dan tujuan, serta Sistematika Penulisan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025– 2029

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan, fungsi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, serta proses penyusunan Renstra BPBD Kota Balikpapan

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan.

## **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1.3.1 MAKSUD**

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan.

### **1.3.2 TUJUAN**

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab BPBD Kota Balikpapan disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan, dan informasi yang dianalisis dengan analisi deskriptif dan analisi diagnostik

### **2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

menguraikan tentang tugas dan fungsi serta struktur organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan.

#### **2.1.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan BPBD Kota Balikpapan, struktur organisasi BPBD Kota Balikpapan, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Pelaksana BPBD Kota Balikpapan. Uraian tentang struktur organisasi BPBD Kota Balikpapan ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana BPBD Kota Balikpapan (proses, prosedur dan mekanisme).

#### **2.1.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki BPBD Kota Balikpapan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih operasional

#### **2.1.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja BPBD Kota Balikpapan berdasarkan sasaran/ target Renstra BPBD Kota Balikpapan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan BPBD Kota Balikpapan.

#### **2.1.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN**

Kelompok sasaran pelayanan BPBD meliputi seluruh masyarakat dan wilayah yang berpotensi terdampak bencana dan kebakaran Khususnya Kota Balikpapan

### **2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPBD KOTA BALIKPAPAN**

Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan BPBD Kota Balikpapan dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan dengan pelayanan BPBD Kota Balikpapan, ataupun penjangkaran aspirasi Masyarakat atau Pentahelix, sehingga dapat disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan

#### **2.2.1. PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan BPBD Kota Balikpapan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya yang merupakan rumusan permasalahan dari kesenjangan antara

realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

#### **2.2.2. ISU STRATEGIS**

Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis ( isu global,nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi BPBD Kota Balikpapan baik secara langsung ataupun tidak langsung

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam Bab ini memuat penjelasan tentang rumusan Tujuan, Sasaran dan arah kebijakan Jangka Menengah, serta indikator kinerja BPBD Kota Balikpapan

#### **3.1 TUJUAN RENSTRA BPBD KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025-2029**

Penentuan Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dengan mempertimbangkan kondisi BPBD Kota Balikpapan saat ini sehingga dapat merumuskan tujuan yang sesuai

#### **3.2 SASARAN RENSTRA BPBD KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025-2029**

Perumusan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kota Balikpapan serta merupakan *Intermediate Outcome*

#### **3.3 STRATEGI BPBD KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025-2029**

Rencana komprehensif berisikan langkah-langkah untuk optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra BPBD Kota Balikpapan

#### **3.4 ARAH KEBIJAKAN BPBD KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025-2029**

Rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai tugas dan Fungsi BPBD Kota Balikpapan dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan/sasaran Renstra BPBD Kota Balikpapan

### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan hasil cascading dari tujuan sasaran outcome dan output rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, dalam mencapai kinerja BPBD Kota Balikpapan untuk menjaga kesinambungan perencanaan renja



#### **4.1 URAIAN PROGRAM**

Perumusan Program sesuai dengan nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang diampu BPBD Kota Balikpapan yang menjadi outcam dalam mencapai sasaran BPBD Kota Balikpapan

#### **4.2 URAIAN KEGIATAN**

Perumusan Kegiatan sesuai dengan nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang diampu BPBD Kota Balikpapan yang menjadi output dalam mencapai sasaran BPBD Kota Balikpapan

#### **4.3 URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF**

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

#### **4.4 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Daftar subkegiatan prioritas penjabaran detail dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan program BPBD Kota Balikpapan

#### **4.5 TARGET Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama ( IKU) Perangkat Daerah**

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja

#### **4.6 TARGET KINERJA Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu tujuan dan sasaran

### **BAB V PENUTUP**

Dalam Bab ini mengungkapkan simpulan dan saran secara singkat terhadap pembahasan yang telah diuraikan

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

#### **2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan yang terdiri dari Kepala, Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana, dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku *ex officio*, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang penanggulangan bencana, berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pada dasarnya adalah membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya bidang penanggulangan bencana terhadap potensi bencana kebakaran pemukiman dan gedung, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana lainnya juga kegiatan operasional non kebencanaan dan kebakaran, serta tantangan ke depan sebagai salah satu Kota Penyangga dan Pintu Gerbang Ibu Kota Negara (IKN).

##### **2.1.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH**

###### **A. Tugas**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan mempunyai tugas:

- a) Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap satu bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Fungsi**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- b) Pengekoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

## **C. Struktur**

Susunan Organisasi BPBD, terdiri dari:

### **A. Kepala BPBD**

Kepala BPBD dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah, Kepala BPBD membawahi unsur pengarah

penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.

B. Unsur Pengarah BPBD

Unsur Pengarah BPBD mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Unsur Pengarah BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan kajian, analisa dan perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. Melaksanaan pemantauan dalam penanggulangan bencana daerah; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

C. Unsur Pelaksana BPBD

a. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana, sekretariat membawahi sub-bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- i. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Unsur Pelaksana BPBD;
- ii. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- iii. Pengoordinasian, perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
- iv. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- v. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- vi. Pengoordinasian bidang-bidang di lingkup Unsur Pelaksana BPBD;
- vii. Pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Unsur Pelaksana BPBD;
- viii. Pelaksanaan pemeliharaan bangunan gedung kantor, pemeliharaan peralatan dan kendaraan operasional penanggulangan bencana daerah serta kendaraan dinas; dan
- ix. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.1 Sub-Bagian Perencanaan Program

- i. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis BPBD;
- ii. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan BPBD;
- iii. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- iv. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BPBD;
- v. Mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- vi. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- vii. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan BPBD;

- viii. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BPBD; dan
- ix. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.2 Sub-Bagian Umum

- i. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- ii. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- iii. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- iv. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- v. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- vi. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana;
- vii. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang kantor;
- viii. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- ix. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- x. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- xi. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- xii. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai; dan
- xiii. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.3 Sub-Bagian Keuangan

- i. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;

- ii. Mengoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
  - iii. Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
  - iv. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
  - v. Menyiapkan Surat Perintah Membayar;
  - vi. Melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;
  - vii. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
  - viii. Menyusun Neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - ix. Mengoordinir dan meneliti anggaran perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - x. Menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
  - xi. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
- i. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - ii. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - iii. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - iv. Pelaksanaan monitoring, identifikasi, pendataan, evaluasi dan pemetaan potensi dan risiko daerah rawan bencana dan kebakaran;
  - v. Pelaksanaan pencegahan dini terhadap potensi rawan bencana dan kebakaran;
  - vi. Pelaksanaan monitoring, identifikasi dan pendataan serta evaluasi dan pemetaan kejadian bencana dan kebakaran;

- vii. Pelaksanaan sosialisasi dalam rangka kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi terhadap daerah rawan bencana dan teknis penanganan bencana dan kebakaran;
- viii. Pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di bidang penanganan bencana dan kebakaran;
- ix. Pelaksanaan peningkatan pengembangan sistem penanganan bencana dan kebakaran secara terpadu;
- x. Pelaksanaan pembinaan tertib administrasi sistem penanganan bencana dan kebakaran;
- xi. Perencanaan sumber daya manusia serta menghimpun potensi rakyat untuk memenuhi syarat menjadi Tim Relawan dalam penanganan bencana dan kebakaran;
- xii. Pelaksanaan penyajian data dan informasi di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- xiii. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- xiv. Pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja program Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
- xv. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3.1 Seksi Pencegahan Bencana

- i. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran Seksi Pencegahan Bencana;
- ii. Merumuskan kebijakan teknis Seksi Pencegahan Bencana;
- iii. Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan pada rawan bencana dan kebakaran;
- iv. Melaksanakan monitoring, identifikasi, pendataan, evaluasi dan pemetaan potensi dan risiko daerah rawan bencana;



- v. Menyusun standar operasional prosedur persyaratan pencegahan bencana alam, bencana non-alam dan bencana sosial;
- vi. Menyusun standar operasional prosedur persyaratan pencegahan kebakaran bangunan gedung dan lingkungan;
- vii. Menyusun program dan kegiatan peningkatan dan pengembangan metode dan peralatan pencegahan kebakaran;
- viii. Melaksanakan pemberian layanan sertifikasi/ rekomendasi persyaratan laik fungsi bidang kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
- ix. Melaksanakan pemberian layanan perizinan penggunaan alat pemadam kebakaran;
- x. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat atau instansi pemerintah terhadap penyimpanan, pengangkutan dan pengamanan barang dan bahan berbahaya yang dapat menimbulkan bencana kebakaran;
- xi. Melaksanakan inventarisasi pengawasan dan pemeriksaan berkala alat pemadam kebakaran, alat pemadam api ringan, *hydrant* gedung, *hydrant* halaman, *springkler*, pendeteksi asap, pendeteksi kenaikan panas, sistem alarm gedung, pompa pemadam terpasang pada gedung, Panel Kontrol, tempat penyimpanan cadangan air, *Fire Brigade* dan Manajemen Kebakaran yang digunakan, tangga darurat, lampu *emergency*, *muster point* (tempat berkumpul) pada kawasan bangunan gedung dan lingkungan, sarana proteksi aktif dan sarana proteksi pasif atau sejenisnya yang berada pada bangunan;
- xii. Memantau pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana dan kebakaran;
- xiii. Meningkatkan dan mengembangkan sistem penanganan bencana dan kebakaran secara terpadu;
- xiv. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi anggaran serta kinerja program Seksi Pencegahan Bencana; dan

- xv. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3.2 Seksi Kesiapsiagaan

- i. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran Seksi Kesiapsiagaan;
  - ii. Merumuskan kebijakan teknis Seksi Kesiapsiagaan;
  - iii. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Kesiapsiagaan;
  - iv. Mengorganisasikan pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
  - v. Menyiapkan lokasi evakuasi;
  - vi. Melaksanakan pembinaan tertib administrasi sistem penanganan bencana dan kebakaran;
  - vii. Menyelenggarakan sosialisasi, pelatihan, simulasi dan gladi dalam rangka kegiatan, kesiapsiagaan, dan mitigasi terhadap tanggap darurat bencana dan kebakaran;
  - viii. Merencanakan sumber daya manusia dan menghimpun potensi rakyat untuk memenuhi syarat menjadi Tim Relawan dalam penanganan bencana dan kebakaran;
  - ix. Merencanakan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di bidang penanganan bencana dan kebakaran;
  - x. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi anggaran serta kinerja program Seksi Kesiapsiagaan; dan
  - xi. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik
- Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:
- i. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di Bidang Kedaruratan dan Logistik;
  - ii. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kedaruratan dan Logistik;
  - iii. Pengoordinasian dan pelaksanaan tugas kegiatan tanggap darurat dan logistik;

- iv. Pengoordinasian pembentukan Tim Reaksi Cepat;
- v. Penyusunan rencana operasi tanggap darurat dan logistik;
- vi. Penyusunan standar operasional prosedur tanggap darurat dan logistik;
- vii. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain di bidang tanggap darurat dan logistik;
- viii. Pelaksanaan pengelolaan logistik pada saat bencana dan kebakaran;
- ix. Pengoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik ke lokasi bencana dan kebakaran;
- x. Penyajian data dan informasi di Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- xi. Pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di Bidang kedaruratan dan Logistik;
- xii. Pelaksanaan monitoring, identifikasi, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- xiii. Penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja program Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
- xiv. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4.1 Seksi Tanggap Darurat, Evakuasi dan Kebakaran

- i. Menyusun program dan kegiatan Seksi Tanggap Darurat, Evakuasi dan Kebakaran;
- ii. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tanggap darurat bencana dan kebakaran;
- iii. Menyiapkan bahan penentuan/penetapan status keadaan darurat bencana dan kebakaran;
- iv. Menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana dan kebakaran;
- v. Menyusun standar operasional prosedur tanggap darurat bencana dan kebakaran;
- vi. Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana dan kebakaran;

- vii. Menyiapkan peralatan penyelamatan dan evakuasi bencana dan kebakaran;
- viii. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana, meliputi: 1.Air Bersih; 2.Pangan; 3.Sandang; 4.Pelayanan kesehatan/psikologis; dan 5.Penampungan/tempat hunian;
- ix. Melaksanakan pengoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik ke lokasi bencana dan kebakaran;
- x. Melaksanakan pengkajian secara cepat, tepat dan akurat terhadap lokasi bencana, kerusakan, kerugian dan kemampuan sumber daya pada saat bencana dan kebakaran;
- xi. Menyusun data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana dan kebakaran; mengoordinasikan pelaksanaan pemulihan prasarana dan sarana vital pada saat tanggap darurat;
- xii. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana dan kebakaran;
- xiii. Melaksanakan monitoring, identifikasi, evaluasi dan pelaporan realisasi anggaran serta kinerja program Seksi Tanggap Darurat, Evakuasi dan Kebakaran; dan
- xiv. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4.2 Seksi Logistik dan Perbekalan

- i. Menyusun program dan kegiatan Seksi Logistik dan Perbekalan;
- ii. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Logistik dan Perbekalan;
- iii. Menyediakan dan menyiapkan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- iv. Menyusun sistem manajemen/pengelolaan peralatan, logistik dan perbekalan untuk pada saat tanggap darurat;

- v. Melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana dan kebakaran;
  - vi. Mengoordinasikan pengerahan dan pengangkutan peralatan, logistik dan perbekalan ke lokasi bencana dan kebakaran;
  - vii. Melaksanakan penerimaan dan pendistribusian peralatan logistik dan perbekalan di lokasi bencana dan kebakaran;
  - viii. Menyajikan data dan informasi Seksi Logistik dan Perbekalan;
  - ix. Melaksanakan fasilitasi proses dan pelayanan di bidang keimigrasian, cukai atau karantina untuk bantuan luar negeri;
  - x. Menyusun laporan kegiatan penggunaan peralatan, logistik dan perbekalan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran;
  - xi. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi anggaran serta kinerja program Seksi Logistik dan Perbekalan; dan
  - xii. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
- i. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - ii. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - iii. Pelaksanaan pengendalian pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan bencana;
  - iv. Perencanaan kebutuhan-kebutuhan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana;
  - v. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perbaikan/pembangunan kembali daerah/lingkungan, prasarana dan sarana umum akibat bencana serta penetapan rancang

bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;

- vi. Penyajian data dan informasi di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- vii. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- viii. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- ix. Penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja program Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- x. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 5.1 Seksi Rehabilitasi

- i. Menyusun program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi;
- ii. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Rehabilitasi;
- iii. Menyusun rencana teknis perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum berdasarkan survei, investigasi dan desain yang disesuaikan dengan kondisi daerah bencana dan kebakaran;
- iv. Melakukan analisa kerusakan dan kerugian akibat bencana dan kebakaran;
- v. Mengoordinasikan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat terkena bencana dan kebakaran;
- vi. Mengoordinasikan pelaksanaan pemulihan sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik pascabencana dan kebakaran;
- vii. Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan-kebutuhan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana dan kebakaran;
- viii. Mengoordinasikan pelaksanaan penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha

dan masyarakat dalam kegiatan rekonstruksi pada wilayah pascabencana dan kebakaran;

- ix. Menyusun laporan kegiatan penggunaan dana bantuan yang diberikan pemerintah dan atau pihak lainnya;
- x. Menyajikan data dan informasi Seksi Rehabilitasi;
- xi. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi anggaran serta kinerja program Seksi Rehabilitasi; dan
- xii. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 5.2 Seksi Rekonstruksi

- i. Menyusun program dan kegiatan Seksi Rekonstruksi;
- ii. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Rekonstruksi;
- iii. Mengoordinasikan dengan instansi terkait dalam perbaikan/pembangunan kembali daerah/ lingkungan, prasarana dan sarana umum akibat bencana serta penetapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
- iv. Melaksanakan pembangunan kembali prasarana dan sarana umum;
- v. Melaksanakan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- vi. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi anggaran serta kinerja program Seksi Rekontruksi; dan
- vii. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## f. UPTD PBD

UPTD dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- i. Pelaksanaan operasional penanggulangan bencana dan kebakaran di wilayah kerjanya;

- ii. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran di wilayah keijanya;
- iii. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Penanggulangan Bencana Daerah;
- iv. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- v. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

g. Sub-Bagian T.U

Dalam melaksanakan tugasnya Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

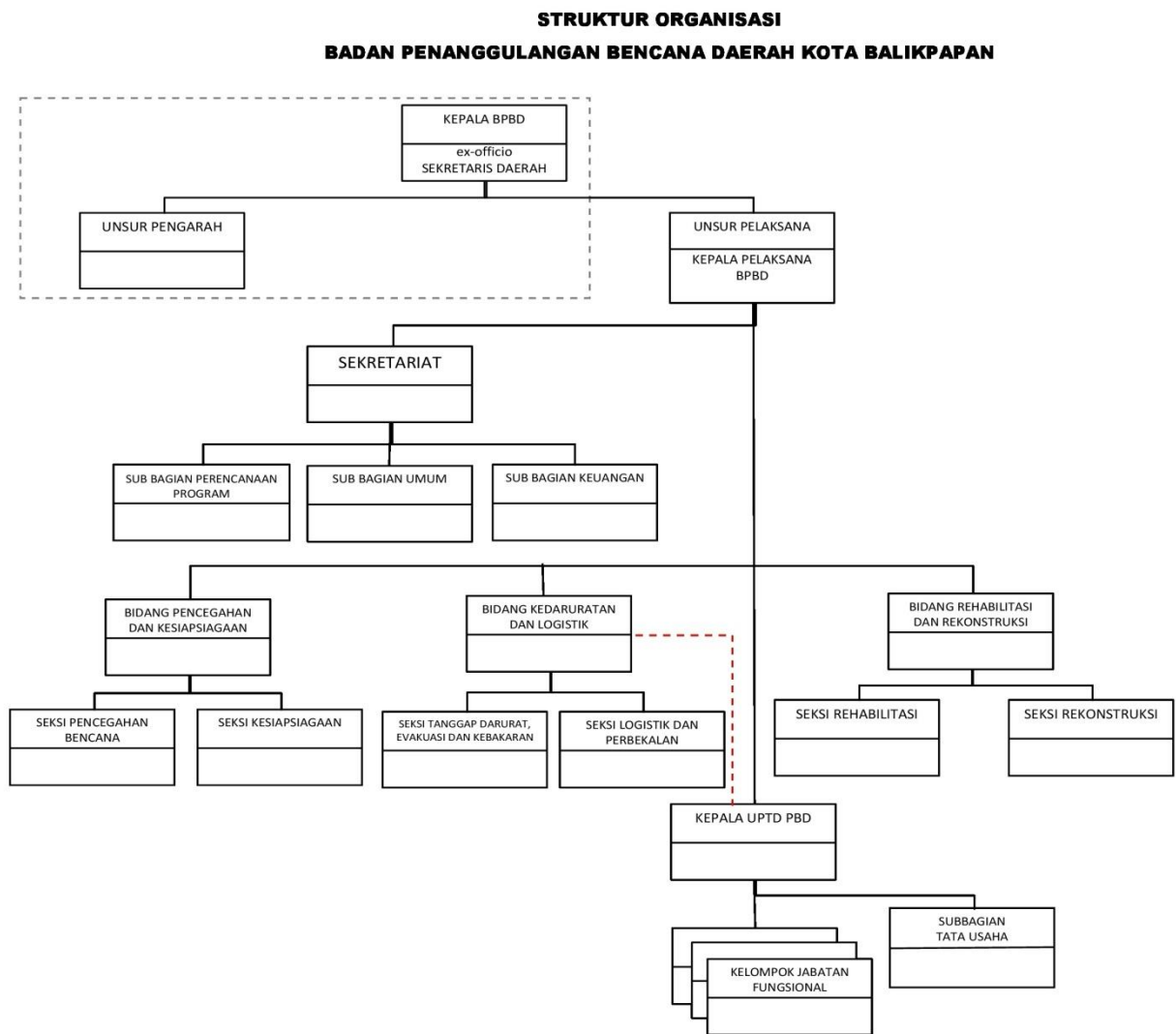
- i. Penyusunan program dan kegiatan UPTD Penanggulangan Bencana Daerah di wilayah kerjanya;
- ii. Pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor UPTD;
- iii. Pelaksanakan administrasi ketatausahaan UPTD;
- iv. Pengelolaan pusat layanan informasi UPTD Penanggulangan Bencana Daerah;
- v. Penyusunan jadwal kegiatan regu operasional penanggulangan bencana;
- vi. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan UPTD Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- vii. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

h. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya.



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah



### 2.1.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Rincian secara lengkap SDM yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

#### a. SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

JENIS KEPEGAWAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN									JUMLAH
	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
	4	29	2	3	-	-	113	4	2	157

PNS / CPNS										
PPPK	-	6		-		-	108	-	2	116
NABAN	-	-	-	-	-	-	31	-	-	31
<b>JUMLAH</b>	<b>4</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>252</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>304</b>

b. SDM Berdasarkan Pangkat/ Golongan/ Ruang

NO	PANGKAT/GOL/RUANG	JUMLAH	JUMLAH SELURUHNYA	KETERANGAN
1.	IV/a	4	5	-
	IV/ b	1		
	IV/c	0		
2.	III/ a	69	99	-
	III/ b	8		
	III/ c	6		
	III/ d	16		
NO	PANGKAT/GOL/RUANG	JUMLAH	JUMLAH SELURUHNYA	KETERANGAN
3.	II/ a	9	52	-
	II/ b	6		
	II/ c	21		
	II/ d	16		

4.	I/ a	-		
	I/ b	-	1	
	I/ c	-		-
	I/ d	1		
5.	IX	6	6	
	V	108	108	PPPK
	I	2	2	
6.	TENAGA BANTUAN	31	31	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	-

Tabel 1.2. Sumber Daya BPBD Berdasarkan Pangkat/ Golongan/ Ruang

c. Berdasarkan Eselon

NO	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1.	II	1	-
2.	III	4	-
3.	IV	21	-

Tabel 1.3. Sumber Daya BPBD Berdasarkan Eselon

d. Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Laki – laki	277	-
2.	Perempuan	27	-

Tabel 1.4. Sumber Daya BPBD Berdasarkan Jenis Kelamin

e. Kelompok Jabatan Fungsional

NO	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Fungsional Keahlian			
	a. Pertama	2	1	3
	b. Muda			
	c. Madya			
	d. Utama			
2.	Fungsional Ketrampilan			
	Pemula	103	3	106
	Terampil			
	Mahir			
	Penyelia			

Tabel 2. Kelompok Jabatan Fungsional

Rincian sarana dan prasarana utama yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

a. Alat Utama Pemadam dan Bencana

NO	NAMA BARANG	KAPASITAS	JUMLAH	SATUAN
1.	Mobil Tangki	16.000 Liter	1	Unit
2.	Mobil Pemadam	10.000 liter	5	Unit
3.	Mobil Tangki	7.000 liter	1	Unit

4.	Mobil Tangki	5.000 Liter	2	Unit
5.	Mobil Tangki	4.000 Liter	7	Unit
6.	Mobil Pemadam	4.000 Liter	8	Unit
7.	Fire Jeep	Double Cabin	4	Unit
<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>KAPASITAS</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SATUAN</b>
8.	Mobil Komando	Double Cabin	1	Unit
9.	Mobil TRC	Double Cabin	1	Unit
10.	Truck Serba guna	-	1	Unit
11.	Truck Angkut Personil	-	1	Unit
12.	Mobil Tangga	20 Meter	1	Unit
13.	Mobil Tangga	32 Meter	1	Unit
14.	Motor Trail	-	12	Unit
15.	Rubber Boat	6 Personil	2	Unit
16.	Fiber Boat	6 Personil	3	Unit
17.	Mobil Komodo		1	Unit
18.	Mobil Pick Up	-	2	Unit
19.	Speed Boat	-	1	Unit

Tabel 3. Alat Utama Pemadam dan Bencana

b. Bangunan

<b>NO</b>	<b>NAMA BANGUNAN</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>NO.TELP</b>
1.	Kantor BPBD Kota Balikpapan	Jl.Ruhui Rahayu I No.03, Sepinggian Balikpapan	(0542) 874095
2.	UPTD PBD Wilayah Barat	Jl. Kilat, Baru Ilir Balikpapan	(0542) 731606

3.	UPTD PBD Wilayah Utara	Jl.Soekarno Hatta Km.11, Karang Joang Balikpapan	(0542) 8533246
4.	UPTD PBD Wilayah Selatan	Jl.Ruhui Rahayu I No.03, Sepinggian Balikpapan	(0542) 113/ (0542) 878207
5.	UPTD PBD Wilayah Timur	Jl.Lumba-Lumba, Manggar Baru Balikpapan	(0542) 743337
6.	UPTD PBD Wilayah Tengah	Jl.Mayjend Sutoyo, Gn.Malang Balikpapan	(0542) 791941
7.	UPTD PBD Wilayah Kota	Jl.Kapten Pierre Tendean, Gn.Pasir Balikpapan	(0542) 8504191
8.	Sektor Wilayah Barat	Jl.21 Januari, Baru Tengah Balikpapan	(0542) 8502132
9.	Sektor Wilayah Utara	Jl.Soekarno Hatta Km.1,5, Gn.Samarinda Baru Balikpapan	(0542) 421113
10.	Pusdalops	Jl.Ruhui Rahayu I No.03, Sepinggian Balikpapan	(0542) 874095

### 2.1.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### Capaian Kinerja BPBD selama 5 tahun terakhir

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					TARGET AKHIR Renstra (2029)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Tingkat Waktu Tanggap	69	69	100	111	102,5	100
2.	Penurunan Dampak Buruk yang diakibatkan Bencana	80	80	232	98	102	100
3.	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan	91	80	111	92	100	100

Tabel 5. Kinerja Pelayanan BPBD

Tabel T-C.23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Informasi Rawan Bencana	NA	NA	NA	NA	NA	90%	91%	92%	NA	NA	92,9	90,2	80	NA	NA	103,22%	99,12%	86,96%
2.	Tingkat Waktu Tanggap	8,60%	98,60%	-	90%	90,40%	93,20%	95,90%	98,60%	80,9	90	90	89,7	92,6	89,99%	99,96%	99,97%	93,53%	93,91%
3.	Cakupan Pelayanan Bencana dan Kebakaran	25%	100%	-	75%	87,50%	100%	100%	100%	90	70	75	81	83,2	120,00%	80,00%	75,00%	81,00%	83,20%
4.	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	20%	90%	-	70%	70%	75%	80%	90%	70	100	100	80	95,4	100%	142,86%	133,33%	100%	88,89%

Tabel 6. T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T-C.24  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian  ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>5,436,865,000</b>	<b>5,984,552,000</b>	<b>6,680,007,000</b>	<b>7,338,308,000</b>	<b>8,062,438,000</b>	<b>5,441,257.800</b>	<b>5,985,383,580</b>	<b>4,902,469,000</b>	<b>5,990,050,000</b>	<b>8,585,500,000</b>	100,08%	100,01%	73,39%	81,63%	106,49%	92,32%	92,25%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250,000,000	275,000,000	302,500,000	332,750,000	366,025,000	182,600,000	200,860,000	231,000,000	330,000,000	605,000,000	73,04%	73,04%	76,36%	99,17%	165,29%	97,38%	101,52%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	73,000,000	80,300,000	88,330,000	97,163,000	106,879,000	121,385,000	133,523,500	99,000,000	88,000,000	93,500,000	166,28%	166,28%	112,08%	90,57%	87,48%	124,54%	120,14%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10,000,000	15,000,000	88,500,000	90,150,000	91,965,000	8,291,800	9,120,980	11,000,000	18,150,000	209,000,000	82,92%	60,81%	12,43%	20,13%	227,26%	80,71%	86,45%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	70,500,000	77,550,000	85,305,000	93,836,000	103,219,000	108,900,000	119,790,000	93,500,000	93,500,000	77,000,000	154,47%	154,47%	109,61%	99,64%	74,60%	118,56%	114,47%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75,000,000	82,500,000	90,750,000	99,825,000	109,808,000	48,301,000	53,131,100	44,000,000	66,000,000	220,000,000	64,40%	64,40%	48,48%	66,12%	200,35%	88,75%	94,22%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,250,000	9,075,000	9,983,000	10,981,000	12,079,000	20,900,000	22,990,000	13,200,000	9,900,000	11,000,000	253,33%	253,33%	132,22%	90,16%	91,07%	164,02%	154,84%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	17,820,000	19,602,000	17,820,000	27,500,000	27,500,000	0,00%	0,00%	71,28%	110,00%	110,00%	58,26%	146,99%
Penyediaan makanan dan minuman	432,000,000	475,200,000	522,720,000	574,992,000	632,491,000	218,322,500	240,154,750	218,322,500	275,000,000	192,500,000	50,54%	50,54%	41,77%	47,83%	30,44%	44,22%	43,39%



Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	1,113,000,000	1,224,300,000	1,346,730,000	1,481,403,000	1,629,543,000	330,000,000	363,000,000	330,000,000	550,000,000	550,000,000	29,65%	29,65%	24,50%	37,13%	33,75%	30,94%	31,24%
Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	3,405,115,000	3,745,627,000	4,120,189,000	4,532,208,000	4,985,429,000	4,384,737,500	4,823,211,250	3,844,626,500	4,532,000,000	6,600,000,000	128,77%	128,77%	93,31%	100,00%	132,39%	116,65%	116,34%
<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>1,835,015,000</b>	<b>35,615,211,000</b>	<b>31,576,732,000</b>	<b>13,134,406,000</b>	<b>13,747,846,000</b>	<b>5,416,189,625</b>	<b>5,957,808,588</b>	<b>7,646,356,575</b>	<b>13,662,000,000</b>	<b>9,130,000,000</b>	295,16%	16,73%	24,22%	104,02%	66,41%	101,31%	43,60%
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	0	24,000,000,000	18,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	1,320,000,000	1,452,000,000	3,960,000,000	6,600,000,000	3,355,000,000	0,00%	6,05%	22,00%	220,00%	111,83%	71,98%	34,76%
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	247,150,000	400,000,000	440,000,000	484,000,000	532,400,000	173,580,000	190,938,000	173,580,000	330,000,000	220,000,000	70,23%	47,73%	39,45%	68,18%	41,32%	53,38%	51,73%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	39,950,000	300,000,000	330,000,000	363,000,000	399,300,000	100,650,000	110,715,000	275,000,000	330,000,000	275,000,000	251,94%	36,91%	83,33%	90,91%	68,87%	106,39%	76,20%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	198,000,000	250,000,000	275,000,000	302,500,000	332,750,000	0	0	0	198,000,000	330,000,000	0,00%	0,00%	0,00%	65,45%	99,17%	32,93%	38,87%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	1,199,723,000	2,500,000,000	2,750,000,000	3,025,000,000	3,327,500,000	1,904,183,050	2,094,601,355	1,650,000,000	2,200,000,000	3,300,000,000	158,72%	83,78%	60,00%	72,73%	99,17%	94,88%	87,08%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	0	0	200,000,000	220,000,000	242,000,000	0	0	0	99,000,000	110,000,000	0,00%	0,00%	0,00%	45,00%	45,45%	18,09%	31,57%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	150,192,000	165,211,000	181,732,000	199,906,000	219,896,000	267,776,575	294,554,233	267,776,575	165,000,000	110,000,000	178,29%	178,29%	147,35%	82,54%	50,02%	127,30%	120,52%
Peningkatan Kinerja dan Prasarana UPT PBD	0	0	1,400,000,000	1,540,000,000	1,694,000,000	1,430,000,000	1,573,000,000	1,320,000,000	1,540,000,000	1,430,000,000	0,00%	0,00%	94,29%	100,00%	84,42%	55,74%	157,38%
Pengadaan Perahu Pemadam	0	8,000,000,000	8,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	0	0	0	2,200,000,000	0	0,00%	0,00%	0,00%	55,00%	0,00%	11,00%	9,17%
Penyusunan DED Gedung Kantor	0	0	0	0	0	220,000,000	242,000,000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Program Peningkatan Disiplin</b>	<b>0</b>	<b>345,000,000</b>	<b>379,500,000</b>	<b>417,450,000</b>	<b>450,000,000</b>	<b>520,506,250</b>	<b>572,556,875</b>	<b>660,000,000</b>	<b>417,450,000</b>	<b>6,600,000,000</b>	0,00%	165,96%	173,91%	100,00%	1466,67%	381,31%	550,93%

Aparatur																	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan-nya	0	345,000,000	379,500,000	417,450,000	450,000,000	520,506.250	572,556,875	660,000,000	417,450,000	6,600,000,000	0,00%	165,96%	173,91%	100,00%	1466,67%	381,31%	550,93%
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	148,799,000	850,000,000	1,943,250,000	2,045,250,000	2,530,250,000	619,410,000	681,351,000	681,340,000	1,025,200,000	1,100,000,000	416,27%	80,16%	35,06%	50,13%	43,47%	125,02%	54,64%
Bimbingan Teknis Aparatur	148,799,000	850,000,000	1,943,250,000	2,045,250,000	2,530,250,000	619,410,000	681,351,000	681,340,000	1,025,200,000	1,100,000,000	416,27%	80,16%	35,06%	50,13%	43,47%	125,02%	54,64%
Program Sarana dan Prasarana Logistik	5,043,314,000	3,635,740,000	9,549,314,000	9,249,246,000	5,489,170,000	6,160,000,000	6,776,000,000	6,215,000,000	8,800,000,000	2,255,000,000	122,14%	186,37%	65,08%	95,14%	41,08%	101,96%	91,63%
Pengadaan Peralatan Penanggulangan	2,651,173,000	2,916,290,000	3,707,919,000	3,528,711,000	3,881,582,000	1,650,000,000	1,815,000,000	1,705,000,000	3,300,000,000	1,650.000.000	62,24%	62,24%	45,98%	93,52%	42,51%	61,30%	60,65%
Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	199,500,000	219,450,000	241,395,000	265,535,000	292,088,000	0	0	0	220,000,000	0	0,00%	0,00%	0,00%	82,85%	0,00%	16,57%	18,06%
Penyusunan DED Gedung Pos	500,000,000	0	500,000,000	250,000,000	0	0	0	0	275,000,000	110,000,000	0,00%	0,00%	0,00%	110,00%	0,00%	22,00%	30,80%
Pembangunan Kantor/Pos Pemadam	792,621,000	0	4,000,000,000	4,000,000,000	0	4,510,000,000	4,961,000,000	4,510,000,000	4,400,000,000	0	569,00%	0,00%	112,75%	110,00%	0,00%	158,35%	209,05%
Penyediaan Fasilitas Kantor/Pos Pemadam	500,000,000	0	550,000,000	600,000,000	650,000,000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penanganan Kejadian Bencana dan Kebakaran (Antisipasi)	400,020,000	500,000,000	550,000,000	605,000,000	665,500,000	1,100,000,000	1,210,000,000	1,100,000,000	605,000,000	495,000,000	274,99%	242,00%	200,00%	100,00%	74,38%	178,27%	165,78%
Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana dan Kebakaran	411,000,000	6,695,760,000	10,551,456,000	8,127,689,000	9,261,938,000	4,293,337,400	4,722,671,140	5,263,814,270	5,531,900,000	5,935,600,000	1044,61%	70,53%	49,89%	68,06%	64,09%	259,44%	73,46%
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	0	374,000,000	356,000,000	404,900,000	422,900,000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanganan Bencana	0	1,300,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	2,890,085,000	3,179,093,500	2,918,999,270	2,640,000,000	1,650,000,000	0,00%	244,55%	121,62%	110,00%	68,75%	108,98%	156,21%

Pendidikan dan Pelatihan Jungle Rescue dan Vertical Rescue	0	300,000,000	330,000,000	363,000,000	399,300,000	0	0	0	363,000,000	286,000,000	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	71,63%	34,33%	46,61%
Pendidikan / Pelatihan Water Rescue	0	300,000,000	330,000,000	363,000,000	399,300,000	0	0	0	363,000,000	286,000,000	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	71,63%	34,33%	46,61%
Pendidikan/ Pelatihan Fire Rescue	0	300,000,000	330,000,000	363,000,000	399,300,000	0	0	0	0	275,000,000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68,87%	13,77%	19,75%
Simulasi Kebakaran dan Evakuasi Gedung Bertingkat	0	400,000,000	440,000,000	484,000,000	532,400,000	0	0	0	165,000,000	330,000,000	0,00%	0,00%	0,00%	34,09%	61,98%	19,21%	26,66%
Simulasi Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	0	600,000,000	660,000,000	726,000,000	798,600,000	0	0	0	0	275,000,000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34,44%	6,89%	9,88%
Bimbingan Teknis Penyegaran Keterampilan Aparatur Penanggulangan Bencana	0	300,000,000	330,000,000	363,000,000	399,300,000	0	0	0	0	165,000,000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	41,32%	8,26%	11,85%
Bimbingan Teknis Peralatan Penanggulangan Bencana Bagi Aparatur	0	250,000,000	300,000,000	350,000,000	400,000,000	0	0	0	0	110,000,000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,50%	5,50%	8,46%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran	11,000,000	12,100,000	13,310,000	14,641,000	16,105,000	0	0	0	14,300,000	17,600,000	0,00%	0,00%	0,00%	97,67%	109,28%	41,39%	47,50%
Pemetaan kawasan rawan Kebakaran Hutan	0	18,800,000	11,800,000	13,068,000	14,375,000	0	0	0	11,000,000	88,000,000	0,00%	0,00%	0,00%	84,18%	612,17%	139,27%	170,56%
Pemetaan Daerah Rawan Bencana	0	46,000,000	100,000,000	0	80,000,000	0	0	0	110,000,000	15,400,000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,25%	3,85%	55,49%
Pengadaan reservoir (GWT) dan pompa	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0	0	550,000,000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,33%
Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan Bencana dan Bahaya Kebakaran	0	0	130,000,000	30,000,000	0	0	0	0	33,000,000	0	0,00%	0,00%	0,00%	110,00%	0,00%	22,00%	20,63%
Pengadaan Early Warning System (EWS)	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	220,000,000	1,100,000.000	0,00%	0,00%	0,00%	22,00%	110,00%	26,40%	44,00%

Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0	0	36,000,000	36,000,000	36,000,000	0	0	0	39,600,000	39,600,000	0,00%	0,00%	0,00%	110,00%	110,00%	44,00%	73,33%
Sosialisasi kepada pedagang pasar tentang penggunaan listrik	0	0	250,000,000	0	0	0	0	0	165,000,000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,00%
Penyuluhan Pencegahan Bencana dan Bahaya Kebakaran	0	194,860,000	214,346,000	235,780,000	259,358,000	0	0	0	66,000,000	253,000,000	0,00%	0,00%	0,00%	27,99%	97,55%	25,11%	35,27%
Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran Dini	0	0	500,000,000	561,300,000	0	596,420,000	656,062,000	550,000,000		385,000,000	0,00%	0,00%	110,00%	0,00%	0,00%	22,00%	206,11%
Sosialisasi Penyebaran Informasi dan Peringatan Dini Potensi Bencana	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Masyarakat	0	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	0	0	0	0	165,000,000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	55,00%	11,00%	18,33%
Pengadaan Inspeksi Sarana Proteksi Kebakaran	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	350,000,000	0	0	0	770,000,000	220,000,000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	62,86%	12,57%	42,13%
Kajian Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	400,000,000	0	0	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Informasi Kinerja berbasis Internet Technology	0	0	20,000,000	20,000,000	55,000,000	0	0	0	22,000,000	275,000,000	0,00%	0,00%	0,00%	110,00%	500,00%	122,00%	312,63%
Interaksi Sarana Proteksi Kebakaran Fasilitas Pemerintah	0	0	0	0	0	694,815,000	764,296,500	694,815,000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Usaha dan Relawan	0	0	0	0	0	112,017,400	123,219,140	1,100,000,000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>21,000,000</b>	<b>22,100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	0,00%	0,00%	0,00%	104,76%	90,50%	39,05%	66,56%

dan Keuangan																	
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi LKjIP	0	0	10,000,000	11,000,000	12,100,000	0	0	0	11,000,000	10,000,000	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	82,64%	36,53%	63,44%
Penyusunan Evaluasi Renja & Renstra	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	11,000,000	10,000,000	0,00%	0,00%	0,00%	110,00%	100,00%	42,00%	70,00%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	10,000,000	10,000,000	30,000,000	24,265,670	26,692,237	0	11,000,000	30,000,000	0,00%	0,00%	0,00%	110,00%	100,00%	42,00%	183,92%
Penyusunan Rencana Strategis	0	0	0	0	20,000,000	24,265,670	26,692,237	0	0	20,000,000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	20,00%	354,79%
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	11,000,000	10,000,000	0,00%	0,00%	0,00%	110,00%	100,00%	42,00%	70,00%
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	0	200,000,000	430,000,000	492,000,000	541,200,000	165,000,000	181,500,000	165,000,000	319,000,000	511,500,000	0,00%	90,75%	38,37%	64,84%	94,51%	57,69%	80,69%
Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani	0	200,000,000	220,000,000	242,000,000	266,200,000	165,000,000	181,500,000	165,000,000	220,000,000	264,000,000	0,00%	90,75%	75,00%	90,91%	99,17%	71,17%	107,25%
Peringatan Hari Besar di Pawai	0	0	210,000,000	250,000,000	275,000,000	0	0	0	99,000,000	247,500.000	0,00%	0,00%	0,00%	39,60%	90,00%	25,92%	47,14%
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100,000,000	600,000,000	1,200,000,000	2,523,917,000	2,700,000,000	1,885,280,100	2,073,808,110	1,650,000,000	550,000,000	770,000,000	1885,28%	345,63%	137,50%	21,79%	28,52%	483,74%	97,27%
Rehabilitasi dan Stimulan sarana prasarana pasca bencana	100,000,000	300,000,000	750,000,000	830,010,000	900,000,000	990,364,100	1,089,400,510	990,000,000	275,000,000	385,000,000	990,36%	363,13%	132,00%	33,13%	42,78%	312,28%	129,51%
ekonstruksi dan Stimulan sarana dan prasarana bencana	0	300,000,000	450,000,000	693,907,000	700,000,000	619,916,000	681,907,600	550,000,000	275,000,000	385,000,000	0,00%	227,30%	122,22%	39,63%	55,00%	88,83%	117,16%
Uji Forensik untuk Investigasi Penyebab Kebakaran	0	0	0	1,000,000,000	1,100,000,000	275,000,000	302,500,000	110,000,000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,74%
Program Tanggap Darurat	0	1,325,000,000	1,450,000,000	1,575,000,000	1,700,000,000	1,265,000,000	1,391,500,000	1,265,000,000	385,000,000	880,000,000	0,00%	105,02%	87,24%	24,44%	51,76%	53,69%	85,73%

Penanggulang n Bencana																	
Pembentukan Relawan Tanggap Darurat dan Simulasi Penanggulangan Bencana dengan Masyarakat dan Aparatur Terkait	0	325,000,000	350,000,000	375,000,000	400,000,000	165,000,000	181,500,000	165,000,000	165,000,000	275,000,000	0,00%	55,85%	47,14%	44,00%	68,75%	43,15%	65,62%
Bimbingan Teknis Petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana	0	425,000,000	450,000,000	475,000,000	500,000,000	0	0	0	220,000,000	165,000,000	0,00%	0,00%	0,00%	46,32%	33,00%	15,86%	20,81%
Bimbingan Teknis Pengembangan SDM Manajemen Kedaruratan Bencana (Disaster Emergency Management)	0	375,000,000	400,000,000	425,000,000	450,000,000	0	0	0	0	220,000,000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,89%	9,78%	13,33%
Bimbingan Teknis Pengembangan SDM Petugas Monitoring, Evaluasi, Pencatatan dan Pelaporan (PUSDALOPS)	0	200,000,000	250,000,000	300,000,000	350,000,000	0	0	0	0	220,000,000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	62,86%	12,57%	20,00%
Program Pencegahan Dini dan Penanggulang n Korban Bencana Alam	212,000,000	233,200,000	706,520,000	282,172,000	760,389,000	0	0	0	0	275,000,000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36,17%	7,23%	12,53%
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	0	0	450,000,000	0	450,000,000	0	0	0	0	110,000,000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,44%	4,89%	12,22%
Pembentukan Forum Peduli Bencana	80,000,000	88,000,000	96,800,000	106,480,000	117,128,000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Gladi Simulasi Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	132,000,000	145,200,000	159,720,000	175,692,000	193,261,000	0	0	0	0	165,000,000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,38%	17,08%	20,47%



#### **2.1.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN**

Berikut adalah uraian lebih lanjut mengenai kelompok sasaran BPBD:

##### **1. Kelompok Rentan:**

- a) Bayi, Balita, Anak-anak:  
Kelompok ini memerlukan perhatian khusus karena rentan terhadap dampak kesehatan dan trauma psikologis akibat bencana.
- b) Ibu Hamil dan Menyusui:  
Kelompok ini juga memerlukan perhatian khusus karena kebutuhan nutrisi dan kesehatan mereka sangat penting, terutama selama dan setelah bencana.
- c) Penyandang Disabilitas:  
Kelompok ini mungkin mengalami kesulitan dalam evakuasi dan mendapatkan bantuan, sehingga perlu dipertimbangkan dalam rencana mitigasi dan penanggulangan bencana.
- d) Orang Lanjut Usia:  
Kelompok ini juga rentan terhadap dampak kesehatan dan trauma psikologis akibat bencana, serta mungkin mengalami kesulitan dalam evakuasi dan mendapatkan bantuan.

##### **2. Masyarakat Umum:**

- a) BPBD memiliki tanggung jawab untuk melibatkan seluruh masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana, termasuk dalam perencanaan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan pemulihan.
- b) Ini termasuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya bencana, cara mencegahnya, dan langkah-langkah yang perlu diambil saat terjadi bencana.
- c) BPBD juga dapat bekerja sama dengan kelompok masyarakat seperti kelompok siaga bencana desa untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi dalam penanggulangan bencana.

##### **3. Lembaga dan Instansi Terkait:**

- a) BPBD juga berkoordinasi dengan berbagai lembaga dan instansi terkait, seperti pemerintah daerah, dinas terkait, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.
- b) Ini penting untuk memastikan adanya sinergi dan koordinasi yang baik dalam upaya penanggulangan bencana.



## **2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPBD KOTA BALIKPAPAN**

### **2.2.1. PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan evaluasi dan capaian kinerja maka BPBD Kota Balikpapan melakukan Identifikasi Permasalahan

#### **A. Sumber Daya Manusia ( SDM)**

- a. Belum semua petugas penanggulangan bencana dan kebakaran tersertifikasi;
- b. Kekurangan jumlah personil penanggulangan bencana dan kebakaran untuk tenaga operasional lapangan dan supir pemadam kebakaran;
- c. Adanya sertifikasi di bidang damkar dan kebencanaan dengan minimal jenjang pendidikan Strata 1 (S1) sehingga banyak personil damkar yang tidak bisa ikut sertifikasi di beberapa bidang diklat;
- d. Tidak adanya lembaga diklat kebencanaan dan kebakaran yang berada di wilayah Indonesia bagian timur; dan
- e. Kurangnya SDM yang mempunyai disiplin ilmu yang sesuai untuk menunjang tugas dan fungsi penanggulangan bencana dan kebakaran.

#### **B. Sarana Dan Prasarana**

- a. BPBD belum mempunyai gedung kantor yang layak;
- b. Bangunan gedung UPTD PBD yang masih kurang memenuhi standar;
- c. Mobil tangga pemadam kebakaran di BPBD hanya menjangkau 32 meter (maksimal 8 lantai), sementara ada bangunan di Kota Balikpapan mencapai 96 meter (24 lantai);
- d. Beberapa unit damkar sudah berusia lebih dari 25 tahun perlu Peremajaan;

- e. Melihat kondisi topografi dan kelas jalan di Kota Balikpapan mobil damkar dengan kapasitas di bawah 10.000 liter harus lebih diperbanyak agar mampu menjangkau gang sempit;
- f. APD petugas operasional masih belum mencukupi untuk semua personil;
- g. Penggunaan IT sebagai penunjang kelancaran tugas harus dikembangkan;
- h. Belum semua acaman bencana mempunyai *Early Warning System* (EWS);
- i. Belum mempunyai unit yang mampu mengendalikan bahan beracun dan berbahaya (B3);
- j. Kurangnya alokasi anggaran stimulan untuk korban bencana dan kebakaran;
- k. Perlu pengembangan pencegahan kebakaran di kawasan yang dianggap rawan dengan membangun sistem pemadam kawasan; dan
- l. Belum adanya dermaga.

#### C. Dokumen Dasar Kebencanaan.

- a. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP);
- b. Legalisasi Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB);
- c. Legalisasi Dokumen Peta Rawan Bencana (PRB);
- d. BPBD Kota Balikpapan belum menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB);
- e. Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKDB); dan
- f. Dokumen Rencana Kontinjensi harus disusun setiap jenis ancaman bencana.

#### D. Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

- a. Masih ada beberapa kawasan yang tidak masuk dalam WMK karena tidak mampu dijangkau dalam waktu maksimal 15 menit (*response time*) yaitu Kariangau, Teritip;

- b. Masih banyak kawasan yang tidak bisa di akses mobil damkar (gang sempit/ kawasan perbukitan); dan
  - c. Belum ada UPTD Pesisir sehingga tidak bisa mengendalikan kebakaran dari wilayah pesisir.
- E. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kebakaran.
- a. Pembentukan forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB);
  - b. Belum terbentuknya Redkar (Relawan Pemadam Kebakaran);
  - c. Kurangnya Jumlah sekolah aman bencana;
  - d. Kurangnya Jumlah rumah sakit aman bencana; dan
  - e. Kurangnya Jumlah kampung siaga bencana.
- F. Antisipasi dampak peningkatan ancaman bencana dan kebakaran akibat dari sebagai salah satu kawasan penyangga Ibu Kota Negara (IKN).
- a. Peningkatan jumlah penduduk dengan pemindahan IKN; dan
  - b. Terus bertambahnya jumlah dan ketinggian bangunan.

Tabel T-B.35  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Belum semua petugas penanggulangan bencana dan kebakaran tersertifikasi;	Kurangnya sertifikasi
		b. Kekurangan jumlah personil penanggulangan bencana dan kebakaran untuk tenaga operasional lapangan dan supir pemadam kebakaran;	Kurangnya personil
		c. Adanya sertifikasi di bidang damkar dan kebencanaan dengan minimal jenjang pendidikan Strata 1 (S1) sehingga banyak personil damkar yang tidak bisa ikut sertifikasi di beberapa bidang diklat;	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi
		d. Tidak adanya lembaga diklat kebencanaan dan kebakaran yang berada di wilayah Indonesia bagian timur; dan	Kurangnya lembaga diklat kebencanaan dan kebakaran
		e. Kurangnya SDM yang mempunyai disiplin ilmu yang sesuai untuk menunjang tugas dan fungsi penanggulangan bencana dan kebakaran.	Kurangnya kompetensi
2.	Sarana dan Prasarana	a. BPBD belum mempunyai gedung kantor yang layak;	Kondisi kantor kurang layak
		b. Bangunan gedung UPTD PBD yang masih kurang memenuhi standar;	Kondisi bangunan belum standar
		c. Mobil tangga pemadam kebakaran di BPBD hanya menjangkau 32 meter (maksimal 8 lantai), sementara ada bangunan di Kota Balikpapan mencapai 96 meter (24 lantai);	Kurangnya kemampuan sarana dan prasarana
		d. Beberapa unit damkar sudah berusia lebih dari 25 tahun perlu penggantian;	Kurangnya peremajaan kendaraan
		e. Melihat kondisi topografi dan kelas jalan di Kota Balikpapan mobil damkar dengan kapasitas di bawah 5.000 liter harus lebih diperbanyak agar mampu menjangkau gang sempit;	Akses jalan kurang memadai
		f. APD petugas operasional masih belum mencukupi untuk semua personil;	Kurangnya jumlah APD
		g. Penggunaan IT sebagai penunjang kelancaran tugas harus dikembangkan;	Kurangnya Penguasaan IT

		h. Belum semua acaman bencana mempunyai <i>Early Warning System</i> (EWS);	Kurangnya pengadaan EWS
		i. Belum mempunyai unit yang mampu mengendalikan bahan beracun dan berbahaya (B3);	Kurangnya pengadaan kendaraan
		j. Perlu pengembangan pencegahan kebakaran di kawasan yang dianggap rawan dengan membangun sistem pemadam kawasan; dan	Kurangnya sistem pemadam kawasan
		k. Belum adanya dermaga.	Belum adanya dermaga
3.	Dokumen Dasar Kebencanaan	a. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK);	Perlunya pembaharuan RISPK
		b. Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB);	KRB belum digunakan sebagai dasar dalam penyusunan strategi mitigasi dan adaptasi bencana, serta perencanaan tata ruang wilayah
		c. Dokumen Peta Rawan Bencana (PRB);	PRB belum digunakan sebagai dasar dalam penyusunan strategi mitigasi dan adaptasi bencana, serta perencanaan tata ruang wilayah
		d. BPBD Kota Balikpapan belum menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB);	Belum adanya dokumen RPB
		e. Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKDB); dan	Belum adanya dokumen RPKDB
		f. Dokumen Rencana Kontinjensi harus disusun setiap jenis ancaman bencana.	Belum lengkapnya dokumen Rencana Kontinjensi per bencana
4.	Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	a. Masih ada beberapa kawasan yang tidak masuk dalam WMK karena tidak mampu dijangkau dalam waktu maksimal 15 menit ( <i>response time</i> ) yaitu Kariangau, Teritip;	Kurangnya jumlah UPTD
		b. Masih banyak kawasan yang tidak bisa di akses mobil damkar (gang sempit/ kawasan perbukitan); dan	Badan jalan kurang lebar
		c. Belum ada UPTD pesisir sehingga tidak bisa mengendalikan kebakaran dari wilayah pesisir.	Belum adanya UPTD pesisir
5.	Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kebakaran	a. Pembentukan forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB);	Kurangnya legalitas forum PRB
		b. Belum terbentuknya Redkar (Relawan Pemadam Kebakaran);	Kurangnya Redkar
		c. Kurangnya sekolah aman bencana;	Kurangnya Anggaran Sosialisasi dan Edukasi
		d. Minimnya rumah sakit aman bencana; dan	Kurangnya Anggaran Sosialisasi dan Edukasi
		e. Minimnya kampung siaga bencana.	Kurangnya Anggaran Sosialisasi dan Edukasi

6.	Antisipasi dampak peningkatan ancaman bencana dan kebakaran akibat dari sebagai salah satu kawasan penyangga Ibu Kota Negara (IKN)	a. Peningkatan jumlah penduduk dengan pemindahan IKN; dan	Pertambahan penduduk
		b. Terus bertambahnya jumlah dan ketinggian bangunan	Pertambahan jumlah dan tinggi bangunan

Tabel 9.T-B.35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

2.2.2. ISU STRATEGIS

Berdasarkan telaah Visi Misi RPJMD dan Tupoksi BPBD Perlu Peningkatan sarana, prasarana, kapasitas SDM dan SOP yang mampu mempresentasikan kesiapan Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang Ibu Kota Negara Baru, termasuk dalam pemanfaatan teknologi, seperti drone, robot pemadam, mobil kamera dan GPS navigasi unit.

Memperkuat langkah-langkah kesiapsiagaan, pencegahan dan mitigasi bencana, sehingga menjadikan kejadian-kejadian bencana yang pernah terjadi di dalam Kota Balikpapan maupun di daerah/kota/negara lain sebagai bagian pembelajaran bagi aparaturnya pemerintah maupun masyarakat Kota Balikpapan agar meminimalkan dampak, baik kerugian material maupun korban jiwa, hal-hal yang menjadi konsen untuk isustrategis adalah:

- a. Meningkatnya Kejadian Bencana, Banjir, Tanah Longsor, Karhutla, Cuaca Ekstrem dan Kebakaran Pemukiman
- b. Kualitas Dan Kuantitas SDM Belum Memadai
- c. Modernisasi Peralatan Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran
- d. Peningkatan Jumlah Penduduk/ Laju Pertumbuhan Penduduk
- e. Kurangnya Penyebaran Informasi Bencana Kepada Masyarakat
- f. Belum Optimalnya Pelayanan Pasca Bencana
- g. Pemenuhan Dokumen Dasar Kebencanaan.

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan	isu relevan KLHS yang relevan dengan PD	isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			isu strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Trantibumlinmas	Potensi Multi Bencana dan Masyarakat terpapar Multi Bencana	Penanganan Perubahan Iklim	Peningkatan Suhu Global dan Perubahan Pola Cuaca Ekstrem	Ketahanan Pangan, Infrastruktur dan Kesehatan Masyarakat Indonesia	Peningkatan Intensitas dan Frekuensi Bencana Hidrometeorologi Banjir, Kekeringan, Gelombang Panas, Kebakaran, Tanah Longsor dan Kebakaran Hutan	Meningkatnya Kejadian Bencana, Banjir, Tanah Longsor, Karhutla, Cuaca Ekstrem dan Kebakaran Pemukiman
						Kualitas Dan Kuantitas SDM Belum Memadai
						Modernisasi Peralatan Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran
						Peningkatan Jumlah Penduduk/ Laju Pertumbuhan Penduduk
						Kurangnya Penyebaran Informasi Bencana Kepada Masyarakat
						Belum Optimalnya Pelayanan Pasca Bencana

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Melalui Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dan aktif dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kota Balikpapan memasuki tahap pertama di dalam rangkaian pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045. Tahap pertama ini merupakan tahapan krusial karena menentukan agenda transformasi pembangunan untuk 20 tahun mendatang. Visi pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan, yaitu **"Balikpapan Nyaman untuk Semua 2045: Superhub Industri dan Jasa yang Maju dan Berkelanjutan dengan Semangat Madinatul Iman"**. Visi tersebut salah satunya diwujudkan melalui agenda pembangunan tahap pertama yang memiliki tema berupa "Penguatan Fondasi Transformasi: Balikpapan Kota Cerdas dan Kolaboratif .

BPBD Kota Balikpapan Mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Balikpapan 2025-2029 dimana arah pembangunan Kota Balikpapan berdasarkan Visi Walikota Terpilih adalah **"Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman"** keterkaitan BPBD Kota Balikpapan pada RPJMD Kota Balikpapan 2025-2029, yaitu pada Sasaran RPJMD **"Meningkatnya Ketangguhan terhadap bencana"** dengan Indikator Indeks Resiko Bencana Indonesia

3.1 TUJUAN RENSTRA BPBD KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025-2029

Tujuan ini akan memberikan kerangka kerja jangka panjang bagi BPBD Kota Balikpapan agar lebih Fokus dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi BPBD serta mgarahkan alokasi suberdaya secara optimal sehingga di rencanakan sebagai berikut:

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Ketangguhan terhadap bencana			Indeks Resiko Bencana	101	99,8	98,6	97,4	96,2	95
	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Menghadapi Bencana dan Kebakaran		Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	0,83	0,84	0,85	0,86	0,87	0,88
			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran (Nilai)	98,1	98,2	98,3	98,4	98,5	98,6
		Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan	85	85,2	85,4	85,6	85,8	86



		gan Bencana	Bencana (Nilai)						
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Capaian Waktu Tanggap (%)	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70	71	72	73	74	75

### 3.2 SASARAN RENSTRA BPBD KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025-2029

Untuk mencapai tujuan maka BPBD Kota Balikpapan Kriteria sasaran dapat digambarkan dengan SMART – C sebagai berikut :

- a. **Spesific (spesifik)**, sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
- b. **Measurable (dapat diukur)**, target sasaran dinyatakan dengan jelas & terukur;
- c. **Achievable (dapat dicapai)**, target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
- d. **Relevant (relevan)**, mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
- e. **Time Bound (batas waktu)**, periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan
- f. **Continuously Improve (perbaikan berkelanjutan)**, sasaran dapat dicapai secara bertahap.

Untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan di atas, maka ditetapkan indikator pencapaian sasaran. Indikator sasaran ini antara lain digunakan untuk memudahkan perhitungan kinerja pada penyusunan LKjIP setiap tahunnya, sesuai dengan tabel tujuan dan sasaran diatas yang telah menetapkan target hingga lima tahun kedepan

### 3.3 STRATEGI BPBD KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025-2029

Pola pikir penyusunan strategi diawali oleh kegiatan untuk membuat suatu perencanaan yang melibatkan komitmen dan pengerahan tenaga serta diikuti oleh pengumpulan data dan analisa sehingga diperoleh rumusan yang disepakati, dalam penyusunan renstra ini diperlukan stategi untuk mencapai tujuan yaitu:

1. Diawali oleh keinginan untuk merencanakan yang diikuti dengan pengerahan tenaga untuk pengumpulan data serta menganalisanya sehingga diperoleh rumusan yang disepakati.

2. Mengimbas tata nilai yang merujuk kepada lima prinsip yaitu: kualitas, responsibilitas/tanggap dan bertanggungjawab, mutualbersama dan saling menguntungkan, efektif dan efisien sertakebebasan/ inovasi.
3. Meformulasi visi dan misi sehingga tergambar tujuan dan saranserta strategis kebijakan yang relevan dengan pelaksanaan dan perubahan.
4. Menetapkan modal strategis mengikuti sistem, organisasi danmekanisme yang relevan dengan pelaksanaan.
5. Berkaca diri untuk menilai kinerja dan membandingkannya dengansasaran atau keadaan yang ideal berdasarkan pencapaian tugaspokok dan fungsi (TUPOKSI) dan ketersediaan sumber daya.
6. Mengintegrasikan rencana tindakan dalam bentuk program dankegiatan.
7. Menyusun skenario alternarif/kemungkinan dengan merujukkepada hasil analisa SWOT, sehingga ditentukan strategis kebijakanyang tepat berdasarkan kelayakan dari segi sumber daya dandampaknya.
8. Implementasi berdasarkan kepada program/ kegiatan yang telahditetapkan termasuk mengembangkan sistem informasi danpeningkatan kualitas sumber daya (peningkatan kemampuanapararat sebagai tujuan antara)

Berdasarkan isu strategis dan strategi BPBD balikpapan untuk mencapai tujuan maka akan melaksanakan optimalisasi sumberdaya yang ada dan fokus untuk melaksanakan program kegiatan sub kegiatan lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan sesuai dengan tema tahunan dan sinkronisasi dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan kolaboratif, serta pelayanan yang berkualitas

No	Isu strategis	Strategi Pelaksanaan
1	Meningkatnya Kejadian Bencana, Banjir, Tanah Longsor, Karhutla, Cuaca Ekstrim dan Kebakaran Pemukiman	1. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) 2. Pemenuhan Dokumen Kajian Risiko Kebakaran 3. Peningkatan Penanganan Pasca Bencana
2	Kualitas Dan Kuantitas SDM Belum Memadai	1. Meningkatkan SDM dengan Diklat, Bimtek dan Penyegaran ketrampilan 2. Melakukan rekrutmen SDM yang sesuai
3	Modernisasi Peralatan Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran	1. Melakukan pengadaan sarana dan prasaranan Bencana dan kebakaran 2. Melakukan Optimalisasi dan perawatan Sarpras yang ada
4	Peningkatan Jumlah Penduduk/ Laju Pertumbuhan Penduduk	1. Penguatan Kapasitas Masyarakat 2. Peningkatan cakupan WMK
5	Kurangnya Penyebaran Informasi Bencana Kepada Masyarakat	1. Penyebaran KIE dan Pembentukan satuan relawan bencana dan Kebakaran 2. Dukungan sarpras kepada masyarakat
6	Belum Optimalnya Pelayanan Pasca Bencana	1. Peningkatan anggaran bantuan kepada masyarakat korban bencana dan kebakaran

		2. Berperan aktif rehabilitasi Korban bencana dan kebakaran
--	--	---

**3.4 ARAH KEBIJAKAN BPBD KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025-2029**

Sebagai panduan dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPBD kota balikpapan serta untuk memperkuat dan konsisten dengan tujuan jangka panjang maka ada di jabarkan dalam tabel berikut:

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
	Meningkatnya Ketangguhan dalam Penanggulangan Bencana untuk Menjaga Kondusifitas dan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Mitigasi Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui Mitigasi Struktural dan non Struktural	Mengurangi Dampak Kejadian Bencana dan Kebakaran	
			Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM	
			Modernisasi Peralatan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	
			Meningkatnya Penyebaran Informasi Bencana kepada Masyarakat	
			Optimalisasi Pelayanan Pasca Bencana	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 URAIAN PROGRAM

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama dengan pihak yang berkepentingan serta masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan untuk mendukung RPJMD Kota Balikpapan serta Visi dan Misi Walikota sebanyak 3 (tiga) program, yang terbagi ke dalam 2 (dua) kategori, yakni program prioritas dan program pendukung, agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, dengan menentukan Outcome dan Indikator program sebagai berikut:

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran	INDIKATOR SASARAN	Outcome	PROGRAM	INDIKATOR PRORAM
-Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Menghadapi Bencana dan Kebakaran	Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana (Nilai)	Meningkatnya Penanganan Penanggulangan Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (%)
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Capaian Waktu Tanggap (%)	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Kebakaran serta Partisipasi Masyarakat	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Kebakaran (%)
			Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)

4.2 URAIAN KEGIATAN

Kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Balikpapan dalam rangka kerjasama dengan pihak yang berkepentingan, serta masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

No	Immediate	Output	
		Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	Meningkatnya cakupan	Tercapainya Cakupan	Persentase Cakupan

	pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana
		Tercapainya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Tercapainya Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana
3	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Tercapainya Penanganan Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana
4	Meningkatnya cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran	Tercapainya Cakupan layanan inspeksi proteksi kebakaran	Cakupan layanan inspeksi proteksi kebakaran
		Tercapainya Cakupan Layanan Investigasi Kejadian Kebakaran	Cakupan Layanan Investigasi Kejadian Kebakaran
5	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Tercapainya Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran
		Tercapainya Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
6	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Tercapainya Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

4.3 URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				48.819.340.856,00		50.283.921.000,00		52.798.117.000,00		53.854.079.000,00		55.469.701.000,00
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				45.069.413.000,00		42.305.671.000,00		45.008.817.000,00		45.371.329.000,00		46.499.701.000,00
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	83,47	84,50	45.069.413.000,00	85,00	42.305.671.000,00	85,50	45.008.817.000,00	86,00	45.371.329.000,00	86,50	46.499.701.000,00
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				29.880.000,00		110.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00
Tersedianya indikator kinerja yang relevan, terukur dan selaras dari tingkat individu hingga organisasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	1	29.880.000,00	1	110.000.000,00	1	420.000.000,00	1	420.000.000,00	1	420.000.000,00
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1	
	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1	

	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	2		2		2		2		2	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1	
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15.000.000,00		30.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	2	15.000.000,00	2	30.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00
1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		25.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	0,00	1	25.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00
1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00
1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		10.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	0,00	1	10.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00

1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		10.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	0,00	1	10.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14.880.000,00		15.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	1	14.880.000,00	1	15.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		15.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	1	0,00	1	15.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00
1.05.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05.01.2.01.0012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00



Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				36.784.169.000,00		35.000.000.000,00		35.348.817.000,00		35.456.329.000,00		36.009.701.000,00
Laporan realisasi anggaran perangkat daerah secara berkala dan akuntabel	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	1	36.784.169.000,00	1	35.000.000.000,00	1	35.348.817.000,00	1	35.456.329.000,00	1	36.009.701.000,00
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	56		56		56		56		56	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	18		18		18		18		18	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	160	315		315		315		325		325	
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	1		1		1		1		1	
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				36.784.169.000,00		35.000.000.000,00		35.348.817.000,00		35.456.329.000,00		36.009.701.000,00
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	160	315	36.784.169.000,00	315	35.000.000.000,00	315	35.348.817.000,00	325	35.456.329.000,00	325	36.009.701.000,00
1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	56	0,00	56	0,00	56	0,00	56	0,00	56	0,00
1.05.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
1.05.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	18	0,00	18	0,00	18	0,00	18	0,00	18	0,00
1.05.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				500.000.000,00		550.000.000,00		2.250.000.000,00		2.100.000.000,00		2.100.000.000,00
Data dan dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tertib dan akuntabel	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	25	20	500.000.000,00	20	550.000.000,00	100	2.250.000.000,00	100	2.100.000.000,00	100	2.100.000.000,00
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	0		300		300		300		300	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	166	20		20		200		200		200	

	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	25	0		10		10		10		10	
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0		0		1		0		0	
	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	0	0		0		0		0		0	
1.05.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	25	0	0,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		250.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	0	0,00	300	250.000.000,00	300	500.000.000,00	300	500.000.000,00	300	500.000.000,00
1.05.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0,00		0,00		150.000.000,00		0,00		0,00
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05.01.2.05.0007 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

1.05.01.2.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				250.000.000,00		100.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	25	20	250.000.000,00	20	100.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00
1.05.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				250.000.000,00		100.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	166	20	250.000.000,00	20	100.000.000,00	200	500.000.000,00	200	500.000.000,00	200	500.000.000,00
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.487.000.000,00		790.000.000,00		1.565.000.000,00		1.615.000.000,00		1.665.000.000,00
Laporan pelaksanaan administrasi umum dan pengelolaan sarana perkantoran secara efektif dan efisien	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0	2.487.000.000,00	2	790.000.000,00	2	1.565.000.000,00	2	1.615.000.000,00	2	1.665.000.000,00
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7	6		6		6		6		6	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	50		25		30		35		40	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0		25		25		25		25	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	32		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	5		5		5		5		5	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	1		1		1		1		1	

1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000,00		25.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.000.000,00		50.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	1	150.000.000,00	1	50.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00
1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				402.000.000,00		250.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7	6	402.000.000,00	6	250.000.000,00	6	500.000.000,00	6	500.000.000,00	6	500.000.000,00
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				150.000.000,00		50.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	5	150.000.000,00	5	50.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00
1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.015.000.000,00		15.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	32	1.015.000.000,00	1	15.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00
1.05.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				100.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				650.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	50	650.000.000,00	25	250.000.000,00	30	300.000.000,00	35	350.000.000,00	40	400.000.000,00
1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	25	25.000.000,00	25	25.000.000,00	25	25.000.000,00	25	25.000.000,00
1.05.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00

Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				18.364.000,00		1.625.000.000,00		875.000.000,00		905.000.000,00		1.120.000.000,00
Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	18.364.000,00	5	1.625.000.000,00	5	875.000.000,00	5	905.000.000,00	5	1.120.000.000,00
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1		1		4		3		5	
	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	0	0		3		0		0		0	
	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	0		1		0		0		0	
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	0		1		0		0		0	
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		2		0		0		0	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5	0		2		2		2		2	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		1		0		0		0	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	0		4		6		8		10	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	0		5		0		0		15	
1.05.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		200.000.000,00		0,00		0,00		0,00
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5	0	0,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00
1.05.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar				0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		0,00
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0,00		10.000.000,00		0,00		0,00		0,00

Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	3	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				18.364.000,00		20.000.000,00		100.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	18.364.000,00	1	20.000.000,00	4	100.000.000,00	3	75.000.000,00	5	80.000.000,00
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		20.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	5	20.000.000,00	5	125.000.000,00	5	130.000.000,00	5	140.000.000,00
1.05.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				0,00		125.000.000,00		0,00		0,00		0,00
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	125.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		500.000.000,00		0,00		0,00		0,00
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	2	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		100.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	0	0,00	4	100.000.000,00	6	150.000.000,00	8	200.000.000,00	10	250.000.000,00
1.05.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		50.000.000,00		0,00		0,00		150.000.000,00
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	0	0,00	5	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	15	150.000.000,00
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.800.000.000,00		1.950.000.000,00		2.050.000.000,00		2.150.000.000,00		2.250.000.000,00
Laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.800.000.000,00	12	1.950.000.000,00	12	2.050.000.000,00	12	2.150.000.000,00	12	2.250.000.000,00
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	0		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	48		48		48		48		48	
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	48	700.000.000,00	48	700.000.000,00	48	700.000.000,00	48	700.000.000,00	48	700.000.000,00
1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.100.000.000,00		1.200.000.000,00		1.300.000.000,00		1.400.000.000,00		1.500.000.000,00
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.100.000.000,00	12	1.200.000.000,00	12	1.300.000.000,00	12	1.400.000.000,00	12	1.500.000.000,00
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.450.000.000,00		2.280.671.000,00		2.500.000.000,00		2.725.000.000,00		2.935.000.000,00
Barang milik daerah dalam kondisi baik dan fungsional melalui kegiatan pemeliharaan rutin berkala	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	3.450.000.000,00	15	2.280.671.000,00	20	2.500.000.000,00	25	2.725.000.000,00	25	2.935.000.000,00
	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	0		10		10		10		10	
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	0		1		1		1		1	
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	12		1		1		1		1	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	197	60		30		35		40		45	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	10		5		6		7		8	
	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	20		10		10		10		10	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		1		1		1		1	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0		10		15		15		15	



1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				500.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	10	500.000.000,00	5	150.000.000,00	6	200.000.000,00	7	250.000.000,00	8	300.000.000,00
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.600.000.000,00		1.620.671.000,00		1.700.000.000,00		1.800.000.000,00		1.900.000.000,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	197	60	2.600.000.000,00	30	1.620.671.000,00	35	1.700.000.000,00	40	1.800.000.000,00	45	1.900.000.000,00
1.05.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				0,00		100.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00
1.05.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	0	0,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	60.000.000,00
1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	10	50.000.000,00	15	75.000.000,00	15	75.000.000,00	15	75.000.000,00
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		60.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	15	60.000.000,00	20	75.000.000,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00
1.05.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				250.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	12	250.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00
1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00
1.05.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	20	100.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00
1.05.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				1.419.968.000,00		4.231.250.000,00		4.392.500.000,00		4.396.750.000,00		4.250.000.000,00
Meningkatnya Penanganan Penanggulangan Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (%)	90	92	1.419.968.000,00	93	4.231.250.000,00	94	4.392.500.000,00	95	4.396.750.000,00	96	4.250.000.000,00
	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	80	84		86		88		90		92	
1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		650.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00
Tercapainya Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	0	0,00	1	650.000.000,00	1	200.000.000,00	0	200.000.000,00	0	200.000.000,00
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	250	300		100		100		100		100	
1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00
Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	250	300	0,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00
1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				0,00		450.000.000,00		0,00		0,00		0,00

Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	0	0,00	1	450.000.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				250.000.000,00		1.120.000.000,00		1.565.000.000,00		1.468.000.000,00		1.290.000.000,00
Tercapainya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1	250.000.000,00	1	1.120.000.000,00	1	1.565.000.000,00	0	1.468.000.000,00	0	1.290.000.000,00
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	0		0		1		0		0	
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	0		0		0		1		0	
	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	6	0		0		0		6		6	
	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	24	0		40		40		0		0	
	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	0	0		4		4		4		4	
	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	0	0		40		40		0		0	
	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	0	0		10		10		10		10	

	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	0	0		1		1		1		1	
	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		50		50		50		50	
1.05.03.2.02.0013 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				0,00		80.000.000,00		100.000.000,00		0,00		0,00
Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	0	0	0,00	40	80.000.000,00	40	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				0,00		115.000.000,00		130.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00
Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0,00	50	115.000.000,00	50	130.000.000,00	50	155.000.000,00	50	155.000.000,00
1.05.03.2.02.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0,00		100.000.000,00		115.000.000,00		0,00		0,00
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	24	0	0,00	40	100.000.000,00	40	115.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				0,00		0,00		0,00		238.000.000,00		275.000.000,00
Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	238.000.000,00	6	275.000.000,00
1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00

Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	0	0	0,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00
1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota				250.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		0,00		0,00
Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1	250.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05.03.2.02.0023 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana				0,00		0,00		0,00		300.000.000,00		0,00
Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	300.000.000,00	0	0,00
1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				0,00		225.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		300.000.000,00
Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	0	0	0,00	4	225.000.000,00	4	275.000.000,00	4	275.000.000,00	4	300.000.000,00
1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		300.000.000,00		0,00		0,00
Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	0	0,00	0	0,00	1	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				0,00		300.000.000,00		345.000.000,00		400.000.000,00		460.000.000,00
Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	0	0	0,00	1	300.000.000,00	1	345.000.000,00	1	400.000.000,00	1	460.000.000,00
1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				199.968.000,00		1.110.000.000,00		1.195.000.000,00		1.315.000.000,00		1.315.000.000,00
Tercapainya Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	0	0	199.968.000,00	25	1.110.000.000,00	25	1.195.000.000,00	25	1.315.000.000,00	25	1.315.000.000,00

	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	0	0		3		3		3		3	
	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	0	0		1		1		1		1	
	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	100	100		100		100		100		100	
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	200	0		100		100		100		100	
	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	0	0		12		12		12		12	
	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	0	0		1		1		1		1	
	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	0	0		1		1		1		1	
1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00
Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	0	0	0,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00
1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				0,00		70.000.000,00		70.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	0	0	0,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00
1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				199.968.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00
Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	100	100	199.968.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00
1.05.03.2.03.0007 - Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00
Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	0	0	0,00	1	300.000.000,00	1	350.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00

1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota				0,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00
Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	0	0	0,00	25	300.000.000,00	25	300.000.000,00	25	300.000.000,00	25	300.000.000,00
1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				0,00		150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00
Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	200	0	0,00	100	150.000.000,00	100	175.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00
1.05.03.2.03.0010 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit				0,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00
Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	0	0	0,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00
1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				0,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00
Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	0	0	0,00	3	30.000.000,00	3	35.000.000,00	3	40.000.000,00	3	40.000.000,00
1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				970.000.000,00		1.351.250.000,00		1.432.500.000,00		1.413.750.000,00		1.445.000.000,00
Tercapainya Penanganan Pasca Bencana	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	5	12	970.000.000,00	12	1.351.250.000,00	12	1.432.500.000,00	12	1.413.750.000,00	12	1.445.000.000,00
	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	0	0		20		20		20		20	
	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	0		1		1		1		1	

	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	0		1		1		1		1	
	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	0		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	0	1		2		2		2		2	
	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	0	0		20		20		20		20	
	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	0	0		1		1		1		1	
	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	0	0		1		1		1		1	
	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	0	0		1		1		1		1	
	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	0	0		20		20		20		20	
1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				120.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00
Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	0	1	120.000.000,00	1	100.000.000,00	1	125.000.000,00	1	150.000.000,00	1	175.000.000,00



1.05.03.2.04.0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
1.05.03.2.04.0004 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				0,00		50.000.000,00		100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				250.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	0	1	250.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00
1.05.03.2.04.0007 - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00
Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	0	0	0,00	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00
1.05.03.2.04.0008 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00
Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	0	0	0,00	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00
1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				600.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00
Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	5	12	600.000.000,00	12	80.000.000,00	12	85.000.000,00	12	90.000.000,00	12	95.000.000,00
1.05.03.2.04.0011 - Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				0,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00

Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	0	0	0,00	20	500.000.000,00	20	500.000.000,00	20	500.000.000,00	20	500.000.000,00
1.05.03.2.04.0012 - Fasilitas pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
1.05.03.2.04.0014 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00
1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
1.05.03.2.04.0016 - Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		21.250.000,00		22.500.000,00		23.750.000,00		25.000.000,00
Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	0	0,00	1	21.250.000,00	1	22.500.000,00	1	23.750.000,00	1	25.000.000,00
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				2.329.959.856,00		3.747.000.000,00		3.396.800.000,00		4.086.000.000,00		4.720.000.000,00
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Kebakaran serta Partisipasi Masyarakat	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Kebakaran (%)	85	87	2.329.959.856,00	88	3.747.000.000,00	89	3.396.800.000,00	90	4.086.000.000,00	91	4.720.000.000,00

	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Nonkebakaran (%)	97	98		98,5		99		99,5		100	
	Persentase Satuan / Lembaga Yang Telah Membentuk SKKL sesuai RISP KP (%)	76	80		82		84		86		88	
1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.799.983.906,00		2.365.000.000,00		2.070.000.000,00		2.300.000.000,00		2.830.000.000,00
Tercapainya Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran (laporan)	0	0	1.799.983.906,00	1	2.365.000.000,00	1	2.070.000.000,00	1	2.300.000.000,00	1	2.830.000.000,00
	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	20	20		20		20		20		20	
	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	0	34		1		1		0		1	
	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran (Dokumen)	0	0		1		1		1		1	
	jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen)	0	0		4		4		4		4	
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	0	0		12		12		12		12	
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	0	0		1		0		0		1	

	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	0	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0	0		1		0		0		0	
	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	12	0		5		10		10		10	
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0	0		1		0		0		1	
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga)	0	0		50		50		50		50	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	624	25		20		25		30		35	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12		12		12		12		12	
1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	12	0	0,00	5	50.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00
1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				399.984.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	399.984.000,00	12	350.000.000,00	12	400.000.000,00	12	450.000.000,00	12	500.000.000,00
1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00

Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	0	0	0,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00
1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				0,00		50.000.000,00		0,00		0,00		50.000.000,00
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	50.000.000,00
1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00
Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	20	20	250.000.000,00	20	250.000.000,00	20	250.000.000,00	20	300.000.000,00	20	300.000.000,00
1.05.04.2.01.0008 - Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)				500.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		0,00		50.000.000,00
Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	0	34	500.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	0	0,00	1	50.000.000,00
1.05.04.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				0,00		225.000.000,00		0,00		0,00		300.000.000,00
Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0	0	0,00	1	225.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	300.000.000,00
1.05.04.2.01.0012 - Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00

Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran (laporan)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	125.000.000,00	1	150.000.000,00
1.05.04.2.01.0013 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				0,00		225.000.000,00		0,00		0,00		0,00
Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0	0	0,00	1	225.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05.04.2.01.0014 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran (Dokumen)	0	0	0,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00
1.05.04.2.01.0015 - Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05.04.2.01.0016 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen)	0	0	0,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00
1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				499.999.906,00		700.000.000,00		800.000.000,00		900.000.000,00		950.000.000,00
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	624	25	499.999.906,00	20	700.000.000,00	25	800.000.000,00	30	900.000.000,00	35	950.000.000,00
1.05.04.2.01.0018 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				150.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	0	1	150.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
1.05.04.2.01.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga				0,00		75.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00

Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga)	0	0	0,00	50	75.000.000,00	50	80.000.000,00	50	85.000.000,00	50	90.000.000,00
1.05.04.2.01.0023 - Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				80.000.000,00		150.000.000,00		160.000.000,00		170.000.000,00		180.000.000,00
Tercapainya Cakupan layanan inspeksi proteksi kebakaran (%)	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	200	0	80.000.000,00	200	150.000.000,00	200	160.000.000,00	200	170.000.000,00	200	180.000.000,00
	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	200	12		1		1		1		1	
1.05.04.2.02.0001 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	200	0	0,00	200	100.000.000,00	200	100.000.000,00	200	100.000.000,00	200	100.000.000,00
1.05.04.2.02.0002 - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				80.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00
Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	200	12	80.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00
1.05.04.2.03 - Investigasi Kejadian Kebakaran				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya Cakupan Layanan Investigasi Kejadian Kebakaran (%)	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
1.05.04.2.03.0001 - Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00

1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				0,00		432.000.000,00		266.800.000,00		716.000.000,00		760.000.000,00
Tercapainya Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran (%)	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	0	0	0,00	40	432.000.000,00	40	266.800.000,00	40	716.000.000,00	40	760.000.000,00
	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen)	5	0		1		0		0		0	
	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	0	0		0		0		34		34	
1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				0,00		232.000.000,00		266.800.000,00		306.000.000,00		350.000.000,00
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	0	0	0,00	40	232.000.000,00	40	266.800.000,00	40	306.000.000,00	40	350.000.000,00
1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				0,00		0,00		0,00		410.000.000,00		410.000.000,00
Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34	410.000.000,00	34	410.000.000,00
1.05.04.2.04.0003 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana				0,00		200.000.000,00		0,00		0,00		0,00
Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen)	5	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				449.975.950,00		750.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		900.000.000,00
Tercapainya Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar (Dokumen)	0	0	449.975.950,00	0	750.000.000,00	1	850.000.000,00	0	850.000.000,00	0	900.000.000,00



	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)	0	20		20		20		20		20	
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	12	0		12		12		12		12	
	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)	1.107	20		50		75		80		85	
1.05.04.2.05.0001 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia				0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00
Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	12	0	0,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00
1.05.04.2.05.0002 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				0,00		0,00		50.000.000,00		0,00		0,00
Tersedianya Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar Secara Berkala, Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05.04.2.05.0004 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00
Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)	0	20	250.000.000,00	20	250.000.000,00	20	250.000.000,00	20	250.000.000,00	20	250.000.000,00
1.05.04.2.05.0005 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				199.975.950,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)	1.107	20	199.975.950,00	50	300.000.000,00	75	350.000.000,00	80	400.000.000,00	85	450.000.000,00

4.4 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM  
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tercapainya Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana
		1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya
		1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal
		1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tercapainya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		1.05.03.2.02.0013 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota
		1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota
		1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana
		1.05.03.2.02.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
		1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
		1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana
		1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal
		1.05.03.2.02.0023 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal
		1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
		1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal
		1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tercapainya Penanganan Tanggap Darurat Bencana

		1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas
		1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam
		1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman
		1.05.03.2.03.0007 - Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota
		1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota
		1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		1.05.03.2.03.0010 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam
		1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota
	Tercapainya Penanganan Pasca Bencana	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tercapainya Penanganan Pasca Bencana
		1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah
		1.05.03.2.04.0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
		1.05.03.2.04.0004 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan
		1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
		1.05.03.2.04.0007 - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)
		1.05.03.2.04.0008 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)
		1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota
		1.05.03.2.04.0011 - Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota
		1.05.03.2.04.0012 - Fasilitasi pengumpulan data	Tersedianya data penduduk terpilah di

		penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	daerah rawan bencana
		1.05.03.2.04.0014 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal
		1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal
		1.05.03.2.04.0016 - Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran	1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Tercapainya Cakupan layanan inspeksi proteksi kebakaran (%)
		1.05.04.2.02.0001 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
		1.05.04.2.02.0002 - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
		1.05.04.2.03 - Investigasi Kejadian Kebakaran	Tersedianya Cakupan Layanan Investigasi Kejadian Kebakaran (%)
		1.05.04.2.03.0001 - Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)
		1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya
		1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
		1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota
		1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal
		1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

	1.05.04.2.01.0008 - Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya
	1.05.04.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal
	1.05.04.2.01.0012 - Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran
	1.05.04.2.01.0013 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal
	1.05.04.2.01.0014 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran
	1.05.04.2.01.0015 - Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal
	1.05.04.2.01.0016 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran
	1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait
	1.05.04.2.01.0018 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
	1.05.04.2.01.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga
	1.05.04.2.01.0023 - Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal
	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Tercapainya Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)
	1.05.04.2.05.0001 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
	1.05.04.2.05.0002 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar Secara Berkala, Sah, dan Legal
	1.05.04.2.05.0004 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal
	1.05.04.2.05.0005 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis



	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Tercapainya Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran (%)
		1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya
		1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya
		1.05.04.2.04.0003 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana

**4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU) PERANGKAT DAERAH**

Sebagai alat ukur kuantitatif untuk melihat dampak dari pelaksanaan yang telah dilaksanakan, serta memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja kepala pelaksana BPBD Kota Balikpapan maka akan memuat target tahunan sebagai indikator kinerja utama yaitu:

NO	Sasaran	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana (Nilai)	Nilai	85	85,2	85,4	85,6	85,8	86
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Capaian Waktu Tanggap (%)	%	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	70	71	72	73	74	75

**4.6 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI ( IKK)**

Setiap indikator dilengkapi dengan target tahunan yang terukur, mulai dari tahun 2025 hingga 2029, untuk menggambarkan progres pencapaian secara bertahap. Target ini disusun guna mendorong pelaksanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan, efektif, dan adaptif terhadap dinamika perubahan. Melalui penetapan IKU dan target lima tahunan ini, BPBD Kota Balikpapan dapat melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan, menetapkan langkah-langkah perbaikan kebijakan apabila diperlukan, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan

Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakattrantibunlinmas bidang Sub Urusan Bencana dan Kebakaran . Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPBD Kota Balikpapan merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. IKK memiliki fungsi penting dalam memastikan bahwa seluruh pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan berjalan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap meningkatnya ketangguhan terhadap bencana. Dengan menggunakan IKK, BPBD Kota Balikpapan dapat menilai efektivitas intervensi kebijakan dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan. Indikator Kinerja Kunci BPBD Kota Balikpapan disajikan dalam tabel berikut:

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Indeks Ketahanan Daerah	positif	Angka	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86	0,87	0,88
2.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	positif	Nilai	98	98,1	98,2	98,3	98,4	98,5	98,6
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	positif	Nilai	67,91	70	71	72	73	74	75
4.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	positif	Nilai	84,45	85	85,2	85,4	85,6	85,8	86
5.	Persentase Capaian Waktu Tanggap	positif	%	100	100	100	100	100	100	100
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	positif	Indeks	83,47	84,00	84,50	85,00	85,50	86,00	86,50
7.	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	positif	%	90	91	92	93	94	95	96
8.	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Kebakaran	positif	%	85	86	87	88	89	90	91
9.	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	positif	%	100	100	100	100	100	100	100
10.	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Nonkebakaran	positif	%	97	97,5	98	98,5	99	99,5	100

11.	Persentase Satuan / Lembaga Yang Telah Membentuk SKKL sesuai RISP KP	positif	%	76	78	80	82	84	86	88
12.	Persentase Penanganan Pasca Bencana	positif	Persentase	80	82	84	86	88	90	92
13.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	positif	Orang	100.700	101.200	102.000	103.000	104.000	105.000	106.000
14.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	positif	Orang	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	positif	Orang	250	250	250	250	250	250	250
16.	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	negatif	Orang	0	0	0	0	0	0	0
17.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	positif	%	100	100	100	100	100	100	100
18.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	positif	Orang	300	300	300	300	300	300	300



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis harus mampu menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu dimana posisi Organisasi Perangkat Daerah sekarang, akan dibawa kemana Organisasi Perangkat Daerah ini dan bagaimana caranya agar Organisasi Perangkat Daerah dapat sampai ke tujuan.

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi kepala daerah terpilih Kota Balikpapan, yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025- 2029. Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional di Kota Balikpapan. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra ini akan menjadi acuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dalam Penilaian Kinerja. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerangka Acuan Kerja dan RKA serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPd BPBD Kota Balikpapan. Harus diperhatikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target penyelenggaraan bidang/ urusan penunjang dan atau target kinerja sasaran BPBD Kota Balikpapan.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra BPBD Kota Balikpapan yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Kota Balikpapan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) itu akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja BPBD Kota Balikpapan di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih bersinergi dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan target kinerja Renstra BPBD Kota Balikpapan.

## F. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Daerah adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah untuk jangka waktu 5 tahun, yang disusun berdasarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Rencana Strategis) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan yang berlandaskan pada RPJMD Kota Balikpapan berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota, Pemerintah Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Instruksi Mendagri ini yang dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJMD.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029, yang meliputi Penjelasan tahapan penyusunan, Penjelasan tata cara, Pembaharuan sistematika dan penjelasan substansi, Jadwal dan Timeline serta Hal-hal lain yang belum diatur atau dijelaskan regulasi sebelumnya (Periodisasi, penyelarasan, kinerja, Cascading dan lain-lain) dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan. Acuan ini sebagai upaya dalam menyelaraskan RPJMD Tahun 2025 – 2029 yang mencakup penyelarasan kinerja serta periodisasinya.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu, Rencana Strategis berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan

pembangunan Kota Balikpapan berkaitan dengan urusan Pemerintah Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Pelindung Masyarakat.

Rencana Strategis Instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dalam beberapa tahapan, yaitu :

a. Persiapan Penyusunan

Pada tahapan ini perangkat daerah menyusun rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim Rencana Strategis Perangkat Daerah, melaksanakan orientasi mengenai Rencana Strategis Perangkat Daerah, menyusun agenda kerja tim dan melakukan penyiapan data dan informasi perencanaan perangkat daerah.

b. Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal renja dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Rancangan awal Rencana Strategis memuat pendahuluan, gambaran pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan dan penutup.

c. Penyusunan Rancangan

Penyusunan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.

d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Forum ini dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima.

e. Perumusan Rancangan Akhir; dan

Perumusan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan daerah tentang RPJMD. Perumusan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat

Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD.

f. Penetapan

Rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan tentang RPJMD ditetapkan. Verifikasi yang dilakukan BAPPEDA harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis harus selaras dengan peraturan daerah tentang RPJMD.

Rencana Strategis -Perangkat Daerah dimaksud memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD yang disertai dengan target indikator kinerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Balikpapan.

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang tentang Keuangan Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua Tahun 2015 antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan bersama-cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pembangunan :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Peren hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. lebih lanjut penyusunan pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun.

## 1.2 Landasan Hukum

Perencanaan Strategis jangka waktu 5 (lima) tahun Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Balikpapan disusun atas dasar landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Balikpapan Rencana Strategis ( RENCANA STRATEGIS ) 2016-2021 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1995 Tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan Aparatur pemerintah kepada masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ( MENPAN ) Nomor 81 Tahun 1993 Tentang pedoman tatalaksana pelayanan umum;
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Balikpapan;
16. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021, tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
17. Peraturan Daerah sesuai PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistematis Rencana Strategis Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah sesuai Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Sistematis Rencana Strategis Perangkat Daerah;
19. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat.

### **1.3 Sistematis Rencana Strategis Perangkat Daerah Sesuai Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025**

Rancangan awal Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan ini memberikan penjelasan mengenai target kinerja selama tahun 2025-2029, sebagai berikut.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

##### **1.2 Landasan Hukum**

##### **1.3 Maksud dan Tujuan**

##### **1.4 Sistematis Penyusunan**

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BALIKPAPAN**

##### **2.1 Gambaran Pelayanan**

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja**

##### **2.1.2 Sumber Daya Dinas Satuan Polisi Pamong Praja**

##### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja**

##### **2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja**

##### **2.2 Permasalahan**

##### **2.3 Isu Strategis**

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **3.1 Identifikasi Permasalahan Tujuan,**

##### **3.2 Sasaran**

##### **3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja**

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan

BAB V. PENUTUP

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**SATPOL PP KOTA BALIKPAPAN**

**2.1 Gambaran Pelayanan**

**2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

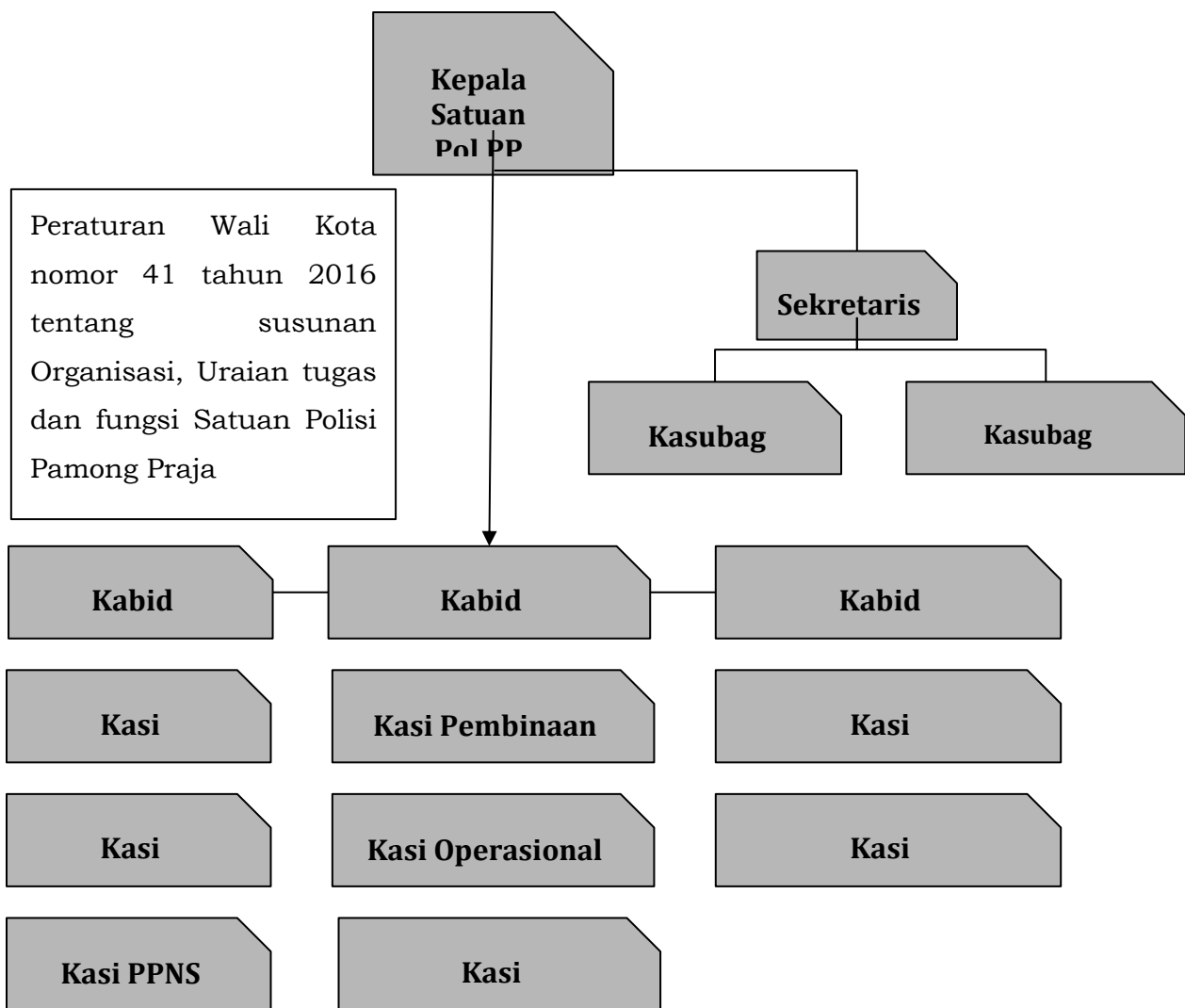
Uraian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan tertuang dalam Peraturan Wali Kota nomor 41 tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah

“Menyelenggarakan urusan penegakan perda dan perwali, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”

Sedangkan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan adalah :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda dan perwali, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan perda dan perwali, di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah dan di bidang perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan perwali serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS, dan/atau aparaturnya lainnya;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan perda dan perwali;
- e. Pelaksanaan keikutsertaan dalam proses penyusunan perda yang memuat sanksi pidana serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan perda dan perwali;
- f. Pengoordinasian pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- g. Pelaksanaan fasilitasi pengamanan dan penertiban barang milik Daerah;
- h. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- i. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan





Uraian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja :

**a. Kepala**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**b. Sekretariat**

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga Satuan, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan.
2. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.
3. Sekretariat membawahkan Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan Satuan;
2. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan tugas;

3. Pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
4. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris Satuan;
5. Pelaksanaan pengadaan pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan Operasional personil;
6. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
7. Pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
8. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
9. Pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan kendaraan operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat serta kendaraan dinas; dan
10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

**Sub Bagian Perencanaan Program** dalam melaksanakan tugas :

1. Melaksanakan penyusunan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
2. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
3. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
4. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
5. Mengumpulkan dan menganalisis data hasil pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
6. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
7. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
8. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Sub Bagian Umum** dalam melaksanakan tugas :

1. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
2. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
3. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;

4. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
5. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
6. Melaksanakan pemeliharaan kendaraan operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat serta kendaraan dinas;
7. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta pengelolaan inventarisasi barang kantor;
8. Melaksanakan pengadaan pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional personil;
9. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
10. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
11. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
12. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
13. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai; dan
14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**c. Bidang Penegakan**

1. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan, serta mengevaluasi di bidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penindakan.
2. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.
3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah membawahkan seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan;
2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan;
3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan;
4. Pelaksanaan proses administrasi terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

5. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
6. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan
8. Ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian PPNS dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan;
10. Pelaksanaan penghentian kegiatan dan/atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
11. Pelaksanaan proses administrasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
12. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
13. Pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan;
14. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan;
15. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan;
16. Pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
17. Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja program Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah; dan
18. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Seksi Pembinaan** dalam melaksanakan tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
2. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
3. Melaksanakan analisa dan pengolahan data serta visualisasi kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Pelindungan Masyarakat;

4. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
5. Melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
6. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
8. Melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
9. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan;
10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

**Seksi Penindakan** dalam melaksanakan tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penindakan;
2. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran Seksi Penindakan;
3. Merencanakan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
4. Menyiapkan bahan, fasilitasi dan pengoordinasian PPNS dalam pelaksanaan proses penindakan;
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
6. Menyiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
7. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyimpanan dan atau penghapusan, pemusnahan barang-barang hasil penertiban pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
8. Menyajikan data dan informasi di Bidang Penindakan;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Penindakan;
10. Melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Penindakan;
11. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Seksi Penindakan; dan
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

**d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**

1. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pembinaan dan pengembangan.
2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Satuan.
3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat membawahkan seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
4. Pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
5. Pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
6. Pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau orang penting dan pengamanan tempat- tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi;
7. Pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di seluruh Daerah;
8. Pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
9. Pelaksanaan penyusunan identifikasi dan potensi kerjasama di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
10. Pelaksanaan pengkoordinasian kerjasama teknis Pemerintah Daerah dengan instansi terkait di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, peningkatan sumber daya Aparatur serta sumber daya anggota perlindungan masyarakat;
11. Penyajian data dan informasi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
12. Penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
13. Penyusunan laporan kinerja program Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan

14. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

**Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat** dalam melaksanakan tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
2. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Bidang Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
4. Menyiapkan rencana pelaksanaan pengawasan pejabat dan atau orang penting, pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi;
5. Menyiapkan rencana pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di seluruh wilayah;
6. Menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
7. Mengelola pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
8. Menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penangkapan terhadap masyarakat yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
9. Menyajikan data dan informasi di bidang operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
10. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian tugas Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
11. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
12. Menyusun laporan realisasi anggaran Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
13. Menyusun laporan kinerja program Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

**Seksi Pembinaan dan Pengembangan** dalam melaksanakan tugas.

1. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya Aparatur;

2. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya Aparatur;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya Aparatur;
4. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis peningkatan kemampuan dan keterampilan dasar Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
5. Melakukan kajian dan melaksanakan pengembangan sumber daya Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan dasar dan atau lanjutan, pelatihan baris berbaris, pencarian dan penyelamatan, bela diri,
6. pengawalan, kesamaptaan, pengamanan, deteksi dini dan cegah dini serta peningkatan fisik;
7. Menyajikan data dan informasi di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya Aparatur;
8. Menyusun laporan realisasi anggaran Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
9. Menyusun laporan kinerja program Seksi Pembinaan dan Pengembangan; dan
10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

**e. Bidang Perlindungan Masyarakat**

1. Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat.
2. Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan.
3. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahkan seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
4. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota Perlindungan Masyarakat;
6. Pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi dan sumber daya perlindungan masyarakat;



7. Pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan satuan perlindungan masyarakat;
8. Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
9. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem perlindungan masyarakat terpadu;
10. Pelaksanaan pembinaan tertib administrasi sistem perlindungan masyarakat;
11. Pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
12. Pelaksanaan koordinasi petugas satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
13. Pelaksanaan koordinasi kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
14. Pelaksanaan koordinasi pengamanan ketertiban masyarakat dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
15. Masyarakat dan bina potensi masyarakat;
16. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat serta pembinaan pengamanan swakarsa;
17. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
18. Penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Perlindungan Masyarakat;
19. Penyusunan laporan kinerja kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
20. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

**Seksi Satuan Linmas** dalam melaksanakan tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang satuan perlindungan masyarakat;
2. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran Seksi satuan perlindungan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang satuan perlindungan masyarakat;
4. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
5. Menyiapkan bahan pembinaan perlindungan masyarakat;
6. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi kelengkapan sarana dan prasarana Pos Keamanan Lingkungan;
7. Menyusun rencana dan melaksanakan optimalisasi dan pengerahan/mobilisasi anggota perlindungan masyarakat;

8. Menyusun rencana dan melaksanakan pemberdayaan dan memanfaatkan anggota perlindungan masyarakat;
9. Menyusun rencana dan mengkoordinasikan pelaksanaan rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota Perlindungan Masyarakat;
10. Menyusun rencana peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat;
11. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
12. Mengkoordinasikan kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
13. Menyajikan data dan informasi di bidang satuan perlindungan masyarakat;
14. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di Seksi satuan perlindungan masyarakat;
15. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
16. Melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
17. Menyusun laporan kinerja program Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan;
18. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Seksi Bina Potensi Masyarakat** dalam melaksanakan tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina potensi masyarakat;
2. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang bina potensi masyarakat;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang bina potensi masyarakat;
4. Menyusun data potensi dan karakteristik sosial budaya masyarakat di bidang perlindungan masyarakat;
5. Menyusun konsep peta potensi kerawanan;
6. Menyusun konsep potensi pencegahan penanggulangan dan potensi masyarakat;
7. Menyusun rencana pengembangan potensi perlindungan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan;
8. Melaksanakan koordinasi petugas satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
9. Menyusun rencana pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan bela negara;
10. Menyajikan data dan informasi di bidang bina potensi masyarakat;
11. Melaksanakan simulasi potensi masyarakat dan Pengamanan Swakarsa;

- 12.Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang bina potensi masyarakat;
- 13.Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bina potensi masyarakat;
- 14.Menyusun laporan realisasi anggaran Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- 15.Menyusun laporan kinerja program Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
- 16.Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Unit Pelaksana** Mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, dan perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan.

**Kelompok Jabatan fungsional** Dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala seksi. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan keahlian.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan dan staf

Jumlah pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025, pada tabel berikut :

No	Jabatan	Jumlah
1	<b>Pegawai dengan Jenjang Pendidikan</b>	
	Pasca Sarjana (S2/S3)	3
	S1	18
	D1/D3	3
	SMA	137
	SMP	0
	SD	1
2	<b>Pegawai berdasarkan Golongan</b>	
	Golongan IV	4
	Golongan III + CPNS	129
	Golongan II + CPNS	28
	Golongan I	1

No	Jabatan	Jumlah
3	<b>Pegawai berdasarkan Jabatan</b>	
	Struktural	12
	Pengadministrasi Perkantoran	6
	Penelaah Teknis Kebijakan	3
	Operator Layanan Operasional	11
	JFT POL PP + CPNS	128
	JFT Analisis SDMA Ahli Pertama	1
	JFT Pranata SDMA Terampil (CPNS)	1
	JFT Penata laksana Terampil (CPNS)	1
4	<b>Jabatan Fungsional Tertentu PolPP</b>	
	Pol PP Ahli Pertama + CPNS	7
	Pol PP Penyelia	1
	Pol PP Mahir	100
	Pol PP Terampil	12
	Pol PP Pelaksana Pemula	8
	Jumlah .....	<b>128 orang</b>
5	<b>Pegawai Perempuan</b>	
	PNS + CPNS	15
	PPPK	17
	Naban	2
	Satgas Linmas	23
	Jumlah .....	<b>57 orang</b>
6	<b>Pegawai Laki-Laki</b>	
	PNS + CPNS	147
	PPPK	37
	Naban	5
	Satgas Linmas	38
	Jumlah.....	<b>227 orang</b>

Jumlah Pegawai keseluruhan Satpol PP PNS sebanyak 156 orang, CPNS sebanyak 6 orang, PPPK sebanyak 54 orang, Tenaga Bantu (Naban) sebanyak 7 orang, dan Satuan Petugas Perlindungan Masyarakat (Satgas Linmas) sebanyak 61 orang **jumlah total keseluruhan berjumlah 284 orang.**

**B. Permasalahan**

Pemetaan Masalah		
Satpol PP Kota Balikpapan		
Masalah Pokok	Masalah	Penyebab masalah /Akar Masalah
Masih terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban	Gangguan Trantibum Linmas masih sering terjadi di beberapa kawasan	Belum optimalnya pengawasan wilayah rawan Terbatasnya jumlah dan jangkauan personel Satpol PP
Penegakan Perda dan Perkada belum maksimal	Kualitas penyidikan/penyelidikan terhadap pelanggaran Perda/Perkada kurang optimal	Rendahnya kapasitas teknis penyidik Belum terbangunnya sistem pelaporan dan penindakan terpadu
Pemberdayaan masyarakat dalam ketertiban belum kuat	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan, penanganan, dan penyelesaian Trantibum	Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam forum kewaspadaan dini Minimnya edukasi dan sosialisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP Kota Balikpapan menghadapi sejumlah permasalahan sebagai berikut:

1. Masalah Pokok masih terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban terutama masalah Gangguan Trantibum Linmas masih sering terjadi di beberapa Kawasan yang menjadi penyebab adalah Belum optimalnya pengawasan wilayah rawan Terbatasnya jumlah dan jangkauan personel Satpol PP;
2. Masalah pokok Penegakan Perda dan Perkada belum maksimal masalahnya Kualitas penyidikan/penyelidikan terhadap pelanggaran Perda/Perkada kurang optimal penyebab masalahnya adalah Rendahnya kapasitas teknis penyidik Belum terbangunnya sistem pelaporan dan penindakan terpadu;
3. Masalah pokok Pemberdayaan masyarakat dalam ketertiban belum kuat yang menyebabkan masalah ini adalah Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan, penanganan, dan penyelesaian Trantibum penyebab masalah dikarenakan Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam forum kewaspadaan dini Minimnya edukasi dan sosialisasi.

**C. Isu Strategis**

Berdasarkan evaluasi internal dan eksternal, serta tantangan pembangunan kedepan, isu-isu strategis yang dihadapi Satpol PP Kota Balikpapan meliputi:

1. **Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur**, termasuk kebutuhan pelatihan khusus, pembinaan mental dan disiplin, serta pengembangan karier yang berbasis kompetensi.
2. **Modernisasi kelembagaan dan digitalisasi layanan**, guna mempercepat proses kerja, meningkatkan transparansi, dan memperluas jangkauan pengawasan.
3. **Penguatan kemitraan dan partisipasi masyarakat**, untuk membangun sinergi dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan aman.
4. **Penguatan peran Satpol PP sebagai unsur pengamanan daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN)**, dengan pendekatan preventif dan responsif terhadap potensi gangguan ketertiban.
5. **Perluasan peran dalam penanganan bencana dan situasi darurat**, khususnya melalui optimalisasi fungsi Linmas yang terlatih dan terorganisir.

### **Bab III**

#### **Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan**

##### **A. Tujuan**

Rencana Strategis Satpol PP Kota Balikpapan menetapkan tujuan utama sebagai berikut:

**Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat dengan indikator Persentase Penyelesaian Temuan dan Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.**

Semakin banyak kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang berhasil ditangani atau diselesaikan, maka ketentraman dan ketertiban masyarakat dianggap meningkat, semakin tinggi persentase kasus yang terselesaikan, semakin baik tingkat ketentraman dan ketertiban masyarakat.

##### **B. Sasaran**

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Satpol PP merumuskan sasaran strategis sebagai penjabaran yang lebih terukur dan spesifik. Sasaran strategis ini disusun dengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan organisasi, serta mempertimbangkan tantangan, peluang, dan kebutuhan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Selama periode 2025–2029, terdapat empat sasaran strategis yang menjadi fokus pencapaian, sebagai berikut :

**1. Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah /Peraturan Kepala Daerah dengan indikator Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah /Peraturan Kepala Daerah (%)**

Kualitas penyelesaian pelanggaran Perda/Perkada dianggap meningkat jika persentase pelanggaran yang berhasil diselesaikan semakin tinggi. Artinya, semakin banyak kasus pelanggaran yang ditindak dan diselesaikan dibanding total pelanggaran yang terjadi, semakin baik kinerjanya.

**2. Meningkatnya Kualitas Pelindungan Masyarakat dengan indikator Rasio Anggota Perlindungan Masyarakat aktif (%);**

Kualitas perlindungan masyarakat dianggap meningkat jika proporsi anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang aktif bertugas dibanding total anggota semakin besar semakin tinggi rasio keaktifannya, semakin baik kualitas perlindungan masyarakat.

**3. Meningkatnya Kualitas Tindak Lanjut Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai indikatornya adalah Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditindaklanjuti (%);**

Kualitas penanganan dianggap meningkat jika persentase kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang berhasil ditangani juga meningkat.

**4. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai);**

Kualitas akuntabilitas kinerja Satpol PP dianggap meningkat jika nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Satpol PP semakin tinggi, karena nilai ini mencerminkan seberapa baik Satpol PP merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Hasil atau Outcome yang diperoleh dari sasaran diatas adalah :

**1. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada, indikatornya adalah Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan (%);**

Semakin besar persentase Perda dan Perkada yang berhasil ditegakkan, semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut. keberhasilan penegakan aturan menjadi tolok ukur meningkatnya kepatuhan.

**2. Meningkatnya Kompetensi SDM PPNS Indikatornya Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (%);**

Kompetensi SDM PPNS dianggap meningkat jika persentase PPNS yang mendapat pelatihan atau peningkatan kemampuan semakin besar dibandingkan jumlah total PPNS yang ada.

**3. Meningkatnya Kompetensi SDM Satlinmas Indikatornya Persentase Satlinmas yang Ditingkatkan Kompetensinya (%);**

Kompetensi SDM Satlinmas dianggap meningkat jika persentase anggota Satlinmas yang mendapatkan pelatihan atau peningkatan kemampuan semakin besar dibandingkan total anggota yang ada.

**4. Meningkatnya Kualitas Penanganan Terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikatornya Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani (%);**

Kualitas penanganan dianggap meningkat jika semakin banyak kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang berhasil ditangani dibandingkan jumlah kasus yang terjadi.

**5. Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Aspek Peningkatan Kualitas Pelayanan, Perencanaan dan Pelaksanaan Kebijakan, Pengelolaan Keuangan, dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dengan Indikatornya Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)**



TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.05.0.00.0.00.02.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
2.	Persentase Penyelesaian Temuan dan Laporan Gangguan Trantibum	%	91	91,7	92	93	94	95	96	
3.	Rasio Anggota Linmas Aktif	%	2,66	2,99	3,39	3,77	3,79	4,19	4,59	
4.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	67,83	68,45	68,65	68,85	69,05	69,25	69,45	
5.	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada	%	85	86	89	91	94	97	98	
6.	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditindaklanjuti	%	99	99,1	99,2	99,3	99,4	99,5	99,6	

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH  
RANCANGAN AKHIR  
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.05.0.00.0.00.02.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA											
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI										
1	Persentase Penyelesaian Temuan dan Laporan Gangguan Trantibum	%	Persentase Penyelesaian Temuan dan Laporan Gangguan Trantibum adalah indikator kinerja yang mengukur efektivitas dan kecepatan suatu instansi dalam menangani dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum). Indikator ini mencerminkan seberapa baik instansi tersebut merespons, memproses, dan menindaklanjuti setiap laporan atau temuan di lapangan.	91	91,7	92	93	94	95	96	
2	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada	%	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada adalah indikator kinerja yang mengukur tingkat efektivitas dan keberhasilan suatu instansi dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Indikator ini mencerminkan sejauh mana aparat pemerintah dapat menegakkan aturan hukum yang berlaku di wilayahnya.	85	86	89	91	94	97	98	

3	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditindaklanjuti	%	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) yang Ditindaklanjuti adalah indikator kinerja yang mengukur responsivitas dan efektivitas suatu instansi dalam merespons dan menindaklanjuti setiap laporan atau temuan mengenai gangguan Trantibum. Indikator ini berfokus pada seberapa cepat dan akurat instansi tersebut mengambil tindakan awal setelah menerima informasi, terlepas dari apakah masalah tersebut sudah selesai atau belum.	99	99,1	99,2	99,3	99,4	99,5	99,6	
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai AKIP Perangkat Daerah adalah skor evaluasi yang diberikan kepada setiap unit kerja di lingkungan pemerintah daerah sebagai hasil dari penilaian terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan seberapa efektif, efisien, dan akuntabel sebuah Perangkat Daerah (PD) dalam mengelola anggaran dan sumber daya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.	67,83	68,45	68,65	68,85	69,05	69,25	69,45	
5	Rasio Anggota Linmas Aktif	%	Rasio Anggota Linmas Aktif adalah indikator kinerja yang mengukur perbandingan antara jumlah anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang terdaftar dan aktif per 10,000 penduduk untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di suatu wilayah. Rasio ini mencerminkan sejauh mana ketersediaan sumber daya manusia di bidang Linmas dapat memenuhi kebutuhan operasional.	2,66	2,99	3,39	3,77	3,79	4,19	4,59	

6	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	%	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya adalah indikator kinerja yang mengukur efektivitas suatu instansi dalam meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui berbagai program pengembangan. Indikator ini mencerminkan komitmen instansi dalam memastikan PPNS memiliki keahlian terkini untuk menjalankan tugas penegakan hukum secara optimal.	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Satlinmas yang ditingkatkan kompetensinya	%	Persentase Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang Ditingkatkan Kompetensinya adalah indikator kinerja yang mengukur efektivitas program-program peningkatan kapasitas yang ditujukan bagi anggota Satlinmas. Indikator ini menunjukkan seberapa besar proporsi anggota Satlinmas yang telah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.	68,39	70,39	72,39	74,39	76,39	78,39	80,39	
8	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	Persentase Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang Ditegakkan adalah indikator kinerja yang mengukur efektivitas dan keberhasilan instansi pemerintah dalam memastikan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada yang berlaku. Indikator ini mencerminkan sejauh mana aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah benar-benar dijalankan dan ditaati oleh publik.	100	100	100	100	100	100	100	

9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah adalah indikator kinerja yang mengukur tingkat kepuasan pegawai terhadap kualitas layanan atau dukungan yang diberikan oleh unit kerja internal di dalam Perangkat Daerah (PD) itu sendiri. IKM ini berbeda dengan IKM eksternal yang mengukur kepuasan masyarakat umum. Fokus utamanya adalah pada kepuasan internal, seperti pelayanan kepegawaian, keuangan, atau dukungan teknis antarbagian.	95,07	95,17	95,27	95,37	95,47	95,57	95,67	
10	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	%	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) yang Ditangani adalah indikator kinerja yang mengukur efektivitas dan keberhasilan suatu instansi dalam merespons, memproses, dan menyelesaikan laporan serta temuan terkait gangguan Trantibum hingga tuntas. Indikator ini mencerminkan komitmen dan kemampuan instansi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat.	100	100	100	100	100	100	100	
11	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota adalah indikator kinerja yang mengukur dampak positif dari penegakan peraturan daerah terhadap masyarakat. Indikator ini menghitung berapa banyak warga negara yang secara langsung maupun tidak langsung merasakan manfaat atau mendapatkan layanan sebagai hasil dari tindakan penertiban atau penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini berfokus pada hasil (outcome) dari penegakan hukum, bukan hanya pada proses penindakannya.	1.894	1.300	1.200	1.100	1.000	900	800	

12	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) yang Dapat Diselesaikan adalah indikator kinerja yang mengukur tingkat keberhasilan dan efektivitas suatu instansi dalam menindaklanjuti dan menuntaskan setiap laporan atau temuan yang berkaitan dengan gangguan Trantibum. Indikator ini mencerminkan seberapa efektif instansi tersebut dalam mengelola dan menyelesaikan masalah dari awal hingga akhir, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang tertib dan aman.	100	100	100	100	100	100	100	
----	---	---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

C. Strategi

Penahapan Rencana Strategis Satpol PP Kota Balikpapan Tahun 2025-2030

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Konsolidasi internal organisasi peningkatan kualitas pelayanan dasar, penyusunan regulasi operasional.	Konsolidasi internal organisasi peningkatan kualitas pelayanan dasar, penyusunan regulasi operasional.	Konsolidasi internal organisasi peningkatan kualitas pelayanan dasar, penyusunan regulasi operasional.	Konsolidasi internal organisasi peningkatan kualitas pelayanan dasar, penyusunan regulasi operasional.	Konsolidasi internal organisasi peningkatan kualitas pelayanan dasar, penyusunan regulasi operasional.
Peningkatan kolaborasi lintas OPD dan partisipasi masyarakat	Peningkatan kolaborasi lintas OPD dan partisipasi masyarakat	Peningkatan kolaborasi lintas OPD dan partisipasi masyarakat	Peningkatan kolaborasi lintas OPD dan partisipasi masyarakat	Peningkatan kolaborasi lintas OPD dan partisipasi masyarakat
Penguatan sistem pengawasan dan penegakan Perda/Perkada	Penguatan sistem pengawasan dan penegakan Perda/Perkada	Penguatan sistem pengawasan dan penegakan Perda/Perkada	Penguatan sistem pengawasan dan penegakan Perda/Perkada	Penguatan sistem pengawasan dan penegakan Perda/Perkada
			Pengamanan Pemilu dan Pemilukada	

Guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut, strategi yang akan ditempuh adalah:

1. **Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi**, untuk mendukung operasional, pelaporan, dan pemantauan kinerja, agar aparaturnya bekerja dengan kompeten dan berintegritas.
2. **Pengembangan sistem peringatan dini dan respons cepat** terhadap gangguan ketertiban atau bencana. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi secara dini potensi gangguan atau bencana dan mempercepat penanganannya agar dampak dapat diminimalkan.
3. **Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan lintas sektor**, termasuk dalam upaya edukasi dan sosialisasi hukum agar masyarakat ikut berperan dan bersinergi dan berkolaborasi antar sektor dalam edukasi dan sosialisasi hukum.
4. **Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana**, agar pelayanan menjadi lebih efisien dan menjangkau seluruh wilayah kecamatan, sarana dan prasarana digunakan seoptimal mungkin demi pelayanan yang efisien.

D. Arah Kebijakan

**Rumusan Arah Kebijakan Rencana Strategis Satpol PP Kota Balikpapan**

No.	Operasionalisasi NSPK (Permendagri 16/2023)	Arah Kebijakan RPJMD Kota Balikpapan 2025–2029	Arah Kebijakan Satpol PP Kota Balikpapan 2025–2030	Keterangan
1	Penegakan Perda dan Perkada	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatkan efektivitas penegakan Perda dan Perkada melalui penguatan kelembagaan dan penindakan	Integrasi peran penegakan hukum daerah
2	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Menjaga stabilitas sosial dan keamanan kota	Mewujudkan kota yang aman, tertib dan nyaman melalui peningkatan patroli, pengawasan, dan penertiban	Dukungan terhadap agenda ketahanan sosial
3	Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana dan gangguan sosial	Memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui peningkatan kapasitas Linmas dan mitigasi risiko	Penguatan peran Linmas dan sinergi kebencanaan
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur Satpol PP	Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas SDM	Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi SDM Satpol PP berbasis teknologi dan pelatihan berkelanjutan	Mendukung Peningkatan profesionalisme SDM
5	Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Ketertiban	Transformasi digital layanan publik	Digitalisasi sistem pengawasan, pelaporan, dan pelayanan Satpol PP	Inovasi pelayanan berbasis digital
6	Penguatan Kolaborasi dengan TNI, Polri, dan OPD terkait	Kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan daerah	Meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan trantibum linmas dan perlindungan masyarakat	Kolaborasi untuk efisiensi dan efektivitas

Dalam pelaksanaan strategi, arah kebijakan Satpol PP Kota Balikpapan difokuskan pada:

1. Penegakan Perda dan Perkada arah kebijakannya RPJMD Tahun 2025 -2029 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih arah kebijakan Satpol PP Meningkatkan efektivitas penegakan Perda dan Perkada melalui penguatan kelembagaan dan penindakan yang harus didukung oleh Integrasi peran penegakan hukum daerah;
2. Ketentraman dan Ketertiban Umum arah kebijakannya RPJMD Tahun 2025 - 2029 Menjaga stabilitas sosial dan keamanan kota arah kebijakan Satpol PP Mewujudkan kota yang aman, tertib dan nyaman melalui peningkatan patroli,



pengawasan, dan penertiban yang harus didukung oleh Dukungan terhadap agenda ketahanan social;

3. Perlindungan Masyarakat arah kebijakannya RPJMD Tahun 2025 -2029 Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana dan gangguan sosial kota arah kebijakan Satpol PP Memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui peningkatan kapasitas Linmas dan mitigasi risiko yang harus didukung oleh Penguatan peran Linmas dan sinergi kebencanaan;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Satpol PP arah kebijakannya RPJMD Tahun 2025 -2029 Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas SDM arah kebijakan Satpol PP Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi SDM Satpol PP berbasis teknologi dan pelatihan berkelanjutan yang harus didukung oleh Peningkatan profesionalisme SDM;
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Ketertiban arah kebijakannya RPJMD Tahun 2025 -2029 Transformasi digital layanan public arah kebijakan Satpol PP Digitalisasi sistem pengawasan, pelaporan, dan pelayanan Satpol PP yang harus didukung oleh Inovasi pelayanan berbasis digital;
6. Penguatan Kolaborasi dengan TNI, Polri, dan OPD terkait arah kebijakannya RPJMD Tahun 2025 -2029 Kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan daerah arah kebijakan Satpol PP Meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan trantibum linmas dan perlindungan masyarakat yang harus didukung oleh Kolaborasi untuk efisiensi dan efektivitas.

Adanya tantangan dari isu-isu strategis dan permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan, diperlukan perumusan strategi kebijakan yang adaptif, responsif, dan berorientasi yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan melalui kebijakan yang tepat. Strategi kebijakan yang disusun diarahkan untuk memperkuat peran Satpol PP sebagai pelindung masyarakat, penegak peraturan daerah, dan pengawal ketertiban yang humanis dan profesional, saat ini ada beberapa kebijakan yang dilakukan:

a. Sosialisasi Perda kepada masyarakat yang sudah dilaksanakan :

- Sosialisasi Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kawasan bebas prostitusi yang mengatur tentang penutupan lokalisasi Manggar Sari dan penegakkan kawasan bebas Prostitusi di Kota Balikpapan. Nomor 10 Tahun 2017 juga mengatur tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, yang dapat terkait dengan Penegakkan Peraturan Daerah (Perda).
- Sosialisasi Perda Juru Parkir Liar oleh Satpol PP Kota Balikpapan dengan Instansi terkait Peraturan Daerah Juru Parkir Liar Nomor 10 Tahun 2017

tentang Penyelenggaraan ketertiban umum diubah melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2021.

- Sosialisasi Perda Ketertiban Umum di masing-masing Kecamatan sebagai peserta masyarakat tokoh sekitar.
- Informasi publik melalui papan himbauan kepada masyarakat tentang himbauan dilarang memberi uang kepada pengemis, gelandangan pengemis, PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), papan himbauan tentang larangan membeli pada area fasilitas umum, serta papan himbauan tentang larangan mengamen di area fasilitas umum dan lampu merah.
- Hotline pengaduan masyarakat yaitu, nomor handphone para komandan regu wilayah 6 Kecamatan Balikpapan. Sdr. Jumadi Komandan Regu Balikpapan Barat 0815 4510 0193, Sdr. Satriyo BW Komandan Regu Balikpapan Kota 0815 4510 0194, Sdr. Rubby Aprianto Komandan regu Balikpapan Selatan 0815 4510 0195, Sdr. Aini Plus/Saiful Helmi Komandan Regu Balikpapan Tengah 0815 4510 0197, Sdr. Krisbanu Aprianto Komandan Regu Balikpapan Timur 0815 4510 0170, Sdr. M. Tauhid Komandan Regu Balikpapan Utara 0815 4510 0198.
- IG Satpol PP Balikpapan
- IG linmas Balikpapan
- Call Center Satpol PP dengan nomor 05428500123 dan layanan aduan masyarakat nomor 08115351111.
- SP4N LAPOR
- Talk Show Smart FM Balikpapan bekerjasama dengan Diskominfo Balikpapan dengan nomor 0811590978.
- Website Satpol Balikpapan

b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, seperti:

- Pengelolaan data tamu berbasis google merupakan sistem yang terdapat data tamu dan tercatat dalam system yang akan memberikan dampak kunjungan tamu bisa di monitor pimpinan.
- Big Satpol PP membantu staf keuangan dalam memberikan informasi tentang rincian gaji yang diperlukan selain itu menjadi control atas pembayaran dan pemotongan gaji terhadap pegawai Satpol PP.

c. Kebijakan pengaduan Masyarakat yang sudah diimplementasikan  
Pengaduan masyarakat Balikpapan telah diimplementasikan melalui saluran pelaporan, seperti layanan pengaduan online atau layanan call centre piket Standby di Markas Komando sebagai pusat komando dan administrasi bagi Satpol PP, guna memfasilitasi partisipasi publik dalam menyampaikan keluhan, aspirasi, serta laporan terkait pelayanan publik.

d. Kebijakan terhadap penilaian SPI oleh KPK RI

Merupakan upaya dalam mengukur tingkat Integritas serta potensi risiko korupsi dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik, dari hasil penilaian, sebagai tindak lanjut atas penilaian survei SPI KPK RI telah dilakukan penyusunan dan melaksanakan langkah-langkah perbaikan serta data dukung untuk penilaian yang lebih baik kedepan, yang mencakup peningkatan transparansi layanan, penguatan pengawasan internal, optimalisasi mekanisme pengaduan masyarakat untuk mendorong aktivitas budaya kerja yang lebih baik dan berintegrasi.

- e. Kebijakan monitoring evaluasi terhadap Laporan Evaluasi Kinerja dan Rencana Aksi per Bidang pada Satpol PP Kota Balikpapan.

Kebijakan monitoring dan evaluasi terhadap Laporan Evaluasi Kinerja dan Rencana Aksi per Bidang pada Satpol PP Kota Balikpapan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan program berjalan efektif, efisien, serta sesuai dengan target yang telah ditetapkan, melalui penilaian berkala atas capaian kinerja dan tindak lanjut rencana aksi tiap bidang. Harapan dari kebijakan ini bisa menghasilkan data capaian kinerja yang akurat, sebagai dasar perbaikan dan pengambilan keputusan yang lebih efektif.

## **Bab IV**

### **Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Bidang Urusan**

#### **A. Program**

Berikut ini merupakan uraian program Satpol PP yang direncanakan sebagai tindak lanjut dari kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

## **B. Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dan Kinerja Bidang Urusan**

1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan sebagai berikut”

### **1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

#### **1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah

1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel

1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN

1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Terwujudnya profesionalisme aparatur perangkat daerah

1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terwujudnya layanan umum perkantoran perangkat daerah

1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya Bahan Logistik Kantor

1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

1.05.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel

Tersedianya Mebel

1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya

1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar berfungsi optimal

1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

#### **1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada

1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

1.05.02.2.02.0004 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1.05.02.2.02.0005 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1.05.02.2.02.0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)

Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah

1.05.02.2.02.0007 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1.05.02.2.02.0008 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah

1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah

Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP

1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Meningkatnya kompetensi SDM PPNS

1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota  
Terciptanya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

1.05.02.2.03.0002 - Pembentukan Sekretariat PPNS

Terbentuknya Sekretariat PPNS

1.05.02.2.03.0003 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam  
Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah

Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan  
Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah

1.05.02.2.03.0004 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah

Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah

1.05.02.2.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS

Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan  
Penegakan Peraturan Daerah

1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS  
Penegak Perda

Meningkatnya kompetensi SDM Satlinmas

1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Terwujudnya SDM Satlinmas yang berkualitas

1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka  
Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan  
Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1.05.02.2.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan  
Masyarakat

Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat

1.05.02.2.01.0019 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota

Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan  
perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota

Meningkatnya kualitas penanganan terhadap gangguan trantibum

1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Terciptanya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum  
serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban  
Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan  
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat  
Kabupaten/Kota

1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

1.05.02.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional

Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja

1.05.02.2.01.0011 - Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP

Melakukan Penilaian terhadap kinerja Pejabat Fungsional

1.05.02.2.01.0012 - Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan

meningkatnya Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pol PP

1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas

Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas

1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan

Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawasan

1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa



1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah

Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada

1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1.05.02.2.01.0022 - Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal

1.05.02.2.01.0023 - Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum

Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				52.134.906.000		53.698.953.000		56.383.901.000		68.224.520.000		58.075.418.000		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				45.980.113.404		47.798.953.000		49.021.901.000		50.530.520.000		51.220.418.000		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	95,07	95,27	45.980.113.404	95,37	47.798.953.000	95,47	49.021.901.000	95,57	50.530.520.000	95,67	51.220.418.000	1.05.0.00.0.00.02.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.999.600		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	0	9.999.600	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	4		4		4		4		4			
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9.999.600		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	4	9.999.600	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000		
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		

Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	0	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				41.385.901.864		42.689.453.000		43.812.901.000		44.877.020.000		45.627.418.000		
Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	214	218	41.385.901.864	220	42.689.453.000	223	43.812.901.000	225	44.877.020.000	227	45.627.418.000		
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				41.385.901.864		42.689.453.000		43.812.901.000		44.877.020.000		45.627.418.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	214	218	41.385.901.864	220	42.689.453.000	223	43.812.901.000	225	44.877.020.000	227	45.627.418.000		
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				306.800		300.000.000		310.000.000		320.000.000		330.000.000		

Terwujudnya profesionalisme aparatur perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	280	283	306.800	286	300.000.000	289	310.000.000	292	320.000.000	295	330.000.000		
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				306.800		300.000.000		310.000.000		320.000.000		330.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	280	283	306.800	286	300.000.000	289	310.000.000	292	320.000.000	295	330.000.000		
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				869.258.317		907.000.000		929.000.000		951.000.000		973.000.000		
Terwujudnya layanan umum perkantoran perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	869.258.317	4	907.000.000	5	929.000.000	6	951.000.000	7	973.000.000		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			

	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	28	26		28		28		30		32			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	3		4		5		6		5			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	9		10		11		12		13			
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				83.935.425		86.000.000		89.000.000		92.000.000		95.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	3	83.935.425	4	86.000.000	5	89.000.000	6	92.000.000	5	95.000.000		

1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				76.015.080		78.000.000		80.000.000		82.000.000		84.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	9	76.015.080	10	78.000.000	11	80.000.000	12	82.000.000	13	84.000.000		
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				404.307.812		415.000.000		425.000.000		435.000.000		445.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	404.307.812	12	415.000.000	12	425.000.000	12	435.000.000	12	445.000.000		
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				105.000.000		108.000.000		110.000.000		112.000.000		114.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	105.000.000	4	108.000.000	5	110.000.000	6	112.000.000	7	114.000.000		

1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0	0	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000		
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000		205.000.000		210.000.000		215.000.000		220.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	28	26	200.000.000	28	205.000.000	28	210.000.000	30	215.000.000	32	220.000.000		
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				76.759.830		175.000.000		180.000.000		530.000.000		375.000.000		
Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	10	76.759.830	12	175.000.000	13	180.000.000	14	530.000.000	15	375.000.000		



	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0		3		3		5		5			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1			
1.05.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		25.000.000		25.000.000		185.000.000		185.000.000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	185.000.000	1	185.000.000		
1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		25.000.000		25.000.000		185.000.000		25.000.000		

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	185.000.000	1	25.000.000		
1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		25.000.000		25.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	3	25.000.000	3	25.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				76.759.830		100.000.000		105.000.000		110.000.000		115.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	10	76.759.830	12	100.000.000	13	105.000.000	14	110.000.000	15	115.000.000		
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.193.949.775		1.225.000.000		1.255.000.000		1.285.000.000		1.315.000.000		

Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	1.193.949.775	12	1.225.000.000	12	1.255.000.000	12	1.285.000.000	12	1.315.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	9	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		0		1		1		1		1			
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		

1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				404.254.500		405.000.000		415.000.000		425.000.000		435.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	404.254.500	4	405.000.000	4	415.000.000	4	425.000.000	4	435.000.000		
1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000		
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				789.695.275		800.000.000		820.000.000		840.000.000		860.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	9	12	789.695.275	12	800.000.000	12	820.000.000	12	840.000.000	12	860.000.000		

1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.443.937.218		2.477.500.000		2.510.000.000		2.542.500.000		2.575.000.000		
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar berfungsi optimal	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	145	182	2.443.937.218	185	2.477.500.000	188	2.510.000.000	191	2.542.500.000	194	2.575.000.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		77		77		77		77		77			
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				2.124.501.718		2.150.000.000		2.175.000.000		2.200.000.000		2.225.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		77	2.124.501.718	77	2.150.000.000	77	2.175.000.000	77	2.200.000.000	77	2.225.000.000		

1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				119.543.500		122.500.000		125.000.000		127.500.000		130.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	145	182	119.543.500	185	122.500.000	188	125.000.000	191	127.500.000	194	130.000.000		
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				199.892.000		205.000.000		210.000.000		215.000.000		220.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	199.892.000	1	205.000.000	1	210.000.000	1	215.000.000	1	220.000.000		
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				6.154.792.596		5.900.000.000		7.362.000.000		17.694.000.000		6.855.000.000		
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	991.623.831	100	1.015.000.000	100	1.042.000.000	100	1.069.000.000	100	1.105.000.000	1.05.0.00.0.00.02.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				991.623.831		1.015.000.000		1.042.000.000		1.069.000.000		1.105.000.000		
Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	12	12	991.623.831	12	1.015.000.000	12	1.042.000.000	12	1.069.000.000	12	1.105.000.000		
	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	0	0		4		6		8		10			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	0	0		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	10	12		12		12		12		12			

	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	0	0		36		36		36		36			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan)	0	0		14		16		18		20			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	6	8		10		12		14		16			
1.05.02.2.02.0004 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan)	0	0	0	14	10.000.000	16	10.000.000	18	10.000.000	20	10.000.000		
1.05.02.2.02.0005 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		



Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	0	0	0	4	10.000.000	6	10.000.000	8	10.000.000	10	10.000.000		
1.05.02.2.02.0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
1.05.02.2.02.0007 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	0	0	0	36	10.000.000	36	10.000.000	36	10.000.000	36	10.000.000		
1.05.02.2.02.0008 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		

Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	0	0	0	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000		
1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				192.645.831		195.000.000		200.000.000		205.000.000		210.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	6	8	192.645.831	10	195.000.000	12	200.000.000	14	205.000.000	16	210.000.000		
1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah				273.087.500		280.000.000		287.000.000		294.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	10	12	273.087.500	12	280.000.000	12	287.000.000	12	294.000.000	12	300.000.000		
1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				525.890.500		490.000.000		505.000.000		520.000.000		545.000.000		

TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	12	12	525.890.500	12	490.000.000	12	505.000.000	12	520.000.000	12	545.000.000		
Meningkatnya kompetensi SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya (%)	100	100	1.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000		
1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				1.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terciptanya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	0	0	1.000.000	7	50.000.000	9	50.000.000	11	50.000.000	13	50.000.000		
	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)	0	0		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	0	0		2		2		2		2			
1.05.02.2.03.0002 - Pembentukan Sekretariat PPNS				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
1.05.02.2.03.0003 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	0	0	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000		

1.05.02.2.03.0004 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	0	0	0	7	10.000.000	9	10.000.000	11	10.000.000	13	10.000.000		
1.05.02.2.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)	0	0	0	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000		
1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				1.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1	1	1.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		

Meningkatnya kompetensi SDM Satlinmas	Persentase Satlinmas yang ditingkatkan kompetensinya (%)	68,39	72,39	2.783.050.940	74,39	2.340.000.000	76,39	3.260.000.000	78,39	12.805.000.000	80,39	2.670.000.000		
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5.162.168.765		4.835.000.000		6.270.000.000		16.575.000.000		5.700.000.000		
Terwujudnya SDM Satlinmas yang berkualitas	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)		12	2.783.050.940	12	2.340.000.000	12	3.260.000.000	12	12.805.000.000	12	2.670.000.000		
	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)		0		253		283		313		343			
	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)		0		1		1		1		1			
1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				2.783.050.940		2.230.000.000		3.150.000.000		12.695.000.000		2.560.000.000		

Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)		12	2.783.050.940	12	2.230.000.000	12	3.150.000.000	12	12.695.000.000	12	2.560.000.000		
1.05.02.2.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)		0	0	253	100.000.000	283	100.000.000	313	100.000.000	343	100.000.000		
1.05.02.2.01.0019 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)		0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
Meningkatnya kualitas penanganan terhadap gangguan trantibum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani (%)	100	100	2.379.117.825	100	2.495.000.000	100	3.010.000.000	100	3.770.000.000	100	3.030.000.000		

1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5.162.168.765		4.835.000.000		6.270.000.000		16.575.000.000		5.700.000.000		
Terciptanya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	0	0	2.379.117.825	50	2.495.000.000	50	3.010.000.000	50	3.770.000.000	50	3.030.000.000		
	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	0	0		345		397		457		557			
	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	0	0		10		10		10		10			
	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			



	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	0	1.368		1.299		1.234		1.172		1.114			
	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	0	347		329		313		297		282			
	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayanijumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	0	0		25		25		25		25			
	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. (Orang)	0	15		25		35		45		55			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	0	61		66		69		72		75			

	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah (Dokumen)	0	0		9		9		9		9			
	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	0	0		25		35		45		55			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	0	0		96		96		96		96			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		48		48		48		48			
1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	0	0	0	48	10.000.000	48	10.000.000	48	10.000.000	48	10.000.000		

	Kabupaten/Kota (Dokumen)													
1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	0	0	0	96	10.000.000	96	10.000.000	96	10.000.000	96	10.000.000		
1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertarikan Umum dan Ketertarikan Masyarakat				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Dokumen SOP Ketertarikan Umum dan Ketertarikan Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertarikan Umum dan Ketertarikan Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	0	0	0	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000		
1.05.02.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		

Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	0	0	0	25	10.000.000	35	10.000.000	45	10.000.000	55	10.000.000		
1.05.02.2.01.0011 - Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Melakukan Penilaian terhadap kinerja Pejabat Fungsional	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah (Dokumen)	0	0	0	9	10.000.000	9	10.000.000	9	10.000.000	9	10.000.000		
1.05.02.2.01.0012 - Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
meningkatnya Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pol PP	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. (Orang)	0	15	0	25	10.000.000	35	10.000.000	45	10.000.000	55	10.000.000		

1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				331.200.000		340.000.000		350.000.000		360.000.000		370.000.000		
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	0	0	331.200.000	345	340.000.000	397	350.000.000	457	360.000.000	557	370.000.000		
1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				428.467.825		440.000.000		450.000.000		460.000.000		470.000.000		
Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	0	347	428.467.825	329	440.000.000	313	450.000.000	297	460.000.000	282	470.000.000		

1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				1.604.450.000		1.500.000.000		1.610.000.000		1.650.000.000		1.690.000.000		
Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	0	1.368	1.604.450.000	1.299	1.500.000.000	1.234	1.610.000.000	1.172	1.650.000.000	1.114	1.690.000.000		
1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah				0		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayanijumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	0	0	0	25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000		
1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum				15.000.000		115.000.000		500.000.000		1.200.000.000		400.000.000		

Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	0	61	15.000.000	66	115.000.000	69	500.000.000	72	1.200.000.000	75	400.000.000		
1.05.02.2.01.0022 - Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dokumen)	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
1.05.02.2.01.0023 - Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	0	0	0	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000		

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS  
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA  
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>1.05.0.00.0.00.02.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>				
1.	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas penanganan terhadap gangguan trantibum	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kompetensi SDM Satlinmas	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kualitas penanganan terhadap gangguan trantibum	1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kompetensi SDM Satlinmas	1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	



		Meningkatnya kualitas penanganan terhadap gangguan trantibum	1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
			1.05.02.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	
			1.05.02.2.01.0011 - Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	
			1.05.02.2.01.0012 - Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	
		Meningkatnya kompetensi SDM Satlinmas	1.05.02.2.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	
		Meningkatnya kualitas penanganan terhadap gangguan trantibum	1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	

			1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
			1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
			1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	
			1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	
		Meningkatnya kompetensi SDM Satlinmas	1.05.02.2.01.0019 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	
		Meningkatnya kualitas penanganan terhadap gangguan trantibum	1.05.02.2.01.0022 - Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
			1.05.02.2.01.0023 - Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	

		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
			1.05.02.2.02.0004 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			1.05.02.2.02.0005 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			1.05.02.2.02.0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	
			1.05.02.2.02.0007 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			1.05.02.2.02.0008 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	
			1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

			1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
			1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
		Meningkatnya kompetensi SDM PPNS	1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
			1.05.02.2.03.0002 - Pembentukan Sekretariat PPNS	
			1.05.02.2.03.0003 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	
			1.05.02.2.03.0004 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	
			1.05.02.2.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	

			1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	
--	--	--	--	--

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah kebijakan dan program kerja Satpol PP dalam mendukung visi pembangunan Kota Balikpapan yang berkelanjutan, aman, dan tertib, khususnya dalam menyongsong peran strategis sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN).

Dokumen ini memuat analisis kondisi pelayanan, permasalahan aktual, serta isu-isu strategis yang menjadi dasar dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, hingga indikator kinerja selama lima tahun ke depan. Dengan landasan tersebut, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Satpol PP dapat bekerja secara sinergis, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pelaksanaan Renstra ini juga memerlukan dukungan koordinasi lintas perangkat daerah, kemitraan dengan masyarakat, serta pengawasan dan evaluasi berkelanjutan agar setiap langkah strategis yang dijalankan dapat beradaptasi dengan dinamika dan tantangan yang terus berkembang.

Akhirnya, semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi rujukan yang efektif dalam upaya mewujudkan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan yang optimal bagi warga Kota Balikpapan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah yang disusun untuk menjabarkan visi, misi, dan arah kebijakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial. Renstra ini menjadi pedoman kerja selama lima tahun ke depan bagi Dinas Sosial dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam menangani berbagai permasalahan sosial di Kota Balikpapan.

Seiring dengan meningkatnya dinamika sosial, urbanisasi, dan tantangan global, Kota Balikpapan menghadapi kompleksitas masalah kesejahteraan sosial yang memerlukan penanganan yang lebih terarah, terintegrasi, dan berbasis data. Masalah seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, keterlantaran, penyandang disabilitas, anak jalanan, lanjut usia terlantar, serta korban bencana sosial terus menjadi fokus perhatian pemerintah daerah.

Penyusunan dokumen ini juga dilandasi oleh berbagai regulasi antara lain: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Renstra ini disusun dengan pendekatan partisipatif dan berbasis data, melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai unsur, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, maupun lembaga sosial. Hal ini bertujuan agar perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dapat lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Adapun tahapan penyusunan dokumen Renstra ini adalah :

1. Persiapan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial;
2. Penyusunan rancangan awal Renstra Dinas Sosial;
3. Penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah;
4. Pelaksanaan Musrenbang Renstra Perangkat Daerah;

5. Perumusan rancangan akhir renstra perangkat daerah;
6. Penetapan renstra perangkat daerah.

Melalui penyusunan Renstra ini, Dinas Sosial Kota Balikpapan berkomitmen untuk terus berinovasi dalam pelayanan sosial, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta memastikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan berkelanjutan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berkeadilan sosial.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur



Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 54);
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
12. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Sosial Kota Balikpapan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, Renstra ini dapat memberikan arah kebijakan dan program strategis dalam penyelenggaraan urusan sosial sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan kesejahteraan sosial.

Tujuan Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah pembangunan sosial Kota Balikpapan pada periode tahun 2025 – 2029;
2. Menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang sosial di Kota Balikpapan dalam melaksanakan pembangunan sosial pada periode tahun 2025 - 2029;
3. Menjadi acuan dalam melakukan penilaian keberhasilan pembangunan sosial kota Balikpapan pada periode tahun 2025 – 2029;
4. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Balikpapan (Rencana Kerja Tahunan);
5. Memberikan dasar dalam Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Dinas Sosial Kota Balikpapan baik Tahunan maupun 5 (lima) Tahunan;
6. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kota Medan pada periode tahun 2025 – 2029.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I. Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis**

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan, yang meliputi: gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis yang ada di Dinas Sosial Kota Balikpapan.

### **BAB III. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pada Dinas Sosial Kota Balikpapan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029.

### **BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini menguraikan tentang program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan pelayanan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatifnya. Selain itu dijelaskan tentang program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

### **BAB V Penutup**

Pada bab ini memuat kesimpulan tentang isi dokumen Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan secara keseluruhan.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

#### 2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Sosial Kota Balikpapan terdiri dari unsur kepala, pejabat struktural, pejabat fungsional dan unsur pelaksana baik itu di lapangan maupun di kantor Dinas Sosial. Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 tahun 2022, Dinas Sosial diamanatkan untuk mengemban tugas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang sosial di Kota Balikpapan. Adapun pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial yaitu:

**1. Pelayanan Rehabilitasi Sosial:** Pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan



Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, dan PPKS lainnya yang membutuhkan rehabilitasi sosial. Pelayanan rehabilitasi sosial ini dilakukan di rumah singgah yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan yang merupakan tempat perlindungan sementara sebelum dikembalikan ke keluarga atau daerah asalnya.

**2. Perlindungan dan Jaminan Sosial:**

Fasilitasi penyaluran bantuan sosial, fasilitasi graduasi mandiri, pengurangan ketergantungan pada bantuan sosial, peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat miskin dan penanganan bagi korban bencana. Program ini memastikan

bahwa program – program perlindungan sosial dan penyaluran bantuan sosial senantiasa tepat sasaran kepada mereka yang benar – benar membutuhkan.

**3. Pemberdayaan Sosial dan pengelolaan data:** Penguatan kapasitas Potensi



Sumber Kesejahteraan Sosial misalnya melalui peningkatan kompetensi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pemberdayaan fakir miskin dan penguatan ekonomi kelompok rentan.

Program ini memastikan tersedianya data PPKS yang valid melalui verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tenaga Puskesmas dan tim pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

### **2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR DINAS SOSIAL KOTA BALIKPAPAN**

Tugas Dinas Sosial Kota Balikpapan adalah Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan Tugas Pembantuan Lainnya Sesuai Ketentuan Perundang – Undangan.

Adapun yang menjadi fungsi dari Dinas Sosial Kota Balikpapan adalah:

1. Menetapkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Menetapkan standar operasional prosedur, target capaian standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, target capaian dan indeks kepuasan masyarakat di bidang sosial;
3. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama di bidang pembangunan kesejahteraan sosial dengan perangkat daerah lainnya di lingkungan pemerintah daerah, instansi vertikal dan lintas sektoral serta pihak terkait;
4. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
5. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Kedudukan Dinas Sosial diatur dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Sosial memiliki Susunan Organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang membawahkan:
  1. Fungsional Perencana; dan
  2. Subbagian Umum.
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial, yang membawahkan:
  1. Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial dan Penyuluhan;

2. Sub Koordinator Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
  3. Sub Koordinator Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
  4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
1. Sub Koordinator Perlindungan Korban Bencana;
  2. Sub Koordinator Pengelolaan Data Fakir Miskin;
  3. Sub Koordinator Pemeliharaan Anak Terlantar dan Jaminan Sosial Keluarga; dan
  4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial yang membawahkan:
1. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti;
  2. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun susun organisasi ini dapat dilihat pada struktur organisasi di bawah ini:

Gambar 1.1  
**Struktur Organisasi Dinas Sosial**



Tugas dan fungsi dari setiap susunan organisasi Dinas Sosial Kota Balikpapan di atas adalah sebagai berikut:

## **1. KEPALA DINAS**

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- b. mengoordinasikan dan melakukan engendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

### **Kepala Dinas Sosial melaksanakan fungsi:**

- a. Penetapan program dan kegiatan di bidang Pembangunan kesejahteraan sosial;
- b. Penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. Pelaksanaan fasilitasi bantuan pembiayaan penerima bantuan iurang kesehatan;
- e. Penyelenggaraan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- f. Penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pengawasan lembaga kesejahteraan sosial yang dikelola pemerintah maupun masyarakat;
- g. Penetapan standar operasional prosedur, target capaian standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, target capaian dan indeks kepuasan masyarakat di bidang sosial;

## **2. SEKRETARIAT**

### **Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian**

- a. perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
- b. administrasi keuangan;
- c. administrasi barang milik Daerah pada Dinas;
- d. administrasi kepegawaian;
- e. administrasi umum;
- f. pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah;
- g. pemeliharaan barang milik Daerah penunjang

- urusan pemerintahan Daerah;
- h. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah;
- i. layanan informasi dan pengaduan; dan
- j. pembinaan pelayanan publik.

**Sekretariat melaksanakan fungsi:**

- a. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran Dinas dan penerimaan retribusi;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. pembinaan dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik;
- k. pengelolaan survei kepuasan masyarakat;
- l. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- m. pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksana;
- n. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan system teknologi informasi;
- o. pengoordinasian bidang dan UPTD;
- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat dibantu oleh:

**1. Subbagian Umum, mempunyai tugas:**

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- g. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- i. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- k. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- n. Memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
- o. Mengelola informasi dan dokumentasi serta pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;
- p. Menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- q. Memfasilitasi pembinaan tatakelola pelayanan publik;
- r. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3. BIDANG PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL

Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang pelayanan rehabilitasi sosial.

#### **Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial melaksanakan fungsi:**

- a. Penyusunan program dan kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial;
- b. Perumusan kebijakan bidang pelayanan rehabilitasi sosial ;



- c. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan orang dengan *human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome* yang tidak memerlukan perawatan panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. Pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan orang dengan *human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome* yang tidak memerlukan perawatan panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum; pengelolaan media komunikasi publik;
- e. Pelaksanaan kerjasama dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, instansi lintas sektoral dan pihak terkait dalam rangka menjalin kemitraan untuk peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial;
- f. Pelaksanaan pembinaan pasca rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan orang dengan *human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome* yang tidak memerlukan perawatan panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;

- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pelayanan Rehabilitasi Sosial terdiri atas:

**1. Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, mempunyai tugas:**



- a. Menyusun program dan kegiatan Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- c. Melaksanakan penyusunan data dan analisis permasalahan penyandang disabilitas;
- d. Melaksanakan layanan rehabilitasi penyandang disabilitas;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan peningkatan sumber daya manusia penyandang disabilitas;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan pengawasan lembaga penyandang disabilitas;
- g. Melaksanakan fasilitasi loka bina karya penyandang disabilitas;
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.

**2. Substansi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia, mempunyai tugas:**

- a. Menyusun program dan kegiatan substansi pelayanan kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia;

- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis pelayanan



kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia;

- c. Melaksanakan penyusunan data dan analisis masalah kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia;
- d. Melaksanakan layanan penyandang masalah kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia;
- e. Melaksanakan pengelolaan rumah perlindungan sosial anak dan lanjut usia terlantar;
- f. Melaksanakan layanan rekomendasi pengangkatan anak;
- g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya;
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan /atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**3. Substansi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan, mempunyai tugas:**

- a. Menyusun program dan kegiatan Substansi rehabilitasi tuna sosial dan korban tindak kekerasan;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis pelayanan rehabilitasi tuna sosial dan korban tindak kekerasan;
- c. Melaksanakan penyusunan data dan analisis masalah tuna sosial dan korban tindak kekerasan;
- d. Melaksanakan layanan rehabilitasi tuna sosial dan korban tindak kekerasan;
- e. Melaksanakan pengelolaan rumah perlindungan trauma center;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.

#### **4. BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

##### **Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :**

- a. Menyusun program kegiatan bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. Perumusan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. Pelaksanaan penanganan dan perlindungan korban bencana;
- d. Pelaksanaan penanganan perlindungan warga/pekerja migran bermasalah sosial;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
- f. Pelaksanaan fasilitasi penyaluran bantuan keluarga penerima manfaat program keluarga harapan;
- g. Pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- h. Pelaksanaan koordinasi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan perlindungan dan penjaminan sosial;
- i. Pelaksanaan layanan rekomendasi dan/atau izin pengumpulan sumbangan sosial;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan;

Pengelompokan substansi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan uraian tugas yang terdiri atas:

##### **1. Substansi Perlindungan Korban Bencana, mempunyai tugas:**

- a. Menyusun program dan kegiatan perlindungan korban bencana;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis pelayanan perlindungan korban bencana;
- c. Melaksanakan penyusunan data perlindungan korban

- bencana;
- d. Menyusun standar operasional prosedur
  - e. penanganan tanggap darurat korban bencana;
  - f. Melaksanakan penanganan tanggap darurat terhadap korban bencana;
  - g. Melaksanakan pemulihan trauma bagi korban bencana;
  - h. Melaksanakan penatausahaan dan penyaluran logistic bencana dan bantuan lainnya;
  - i. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penanganan korban bencana dan penyediaan kebutuhan dasar serta pemulihan trauma korban bencana;
  - j. Melaksanakan pembinaan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat;
  - k. Melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan bahan bangunan rumah korban bencana;
  - l. Melaksanakan pemeliharaan peralatan tanggap darurat bencana;
  - m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.

**2. Substansi Jaminan Sosial Keluarga dan Warga Negara Migran Bermasalah Sosial, mempunyai tugas:**

- a. Menyusun program dan kegiatan substansi jaminan sosial keluarga dan warga negara migran bermasalah sosial;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis pelayanan fasilitasi jaminan sosial dan perlindungan warga negara migran bermasalah sosial;
- c. Melaksanakan penyusunan data penerima jaminan sosial keluarga dan warga negara migran bermasalah sosial;
- d. Melaksanakan layanan rekomendasi jaminan sosial masyarakat tidak mampu;
- e. Melaksanakan fasilitasi pemberian jaminan sosial keluarga dan pelayanan perlindungan warga negara migran bermasalah sosial;
- f. Melaksanakan fasilitasi pembinaan lembaga pengelola/pendamping program jaminan sosial

keluarga;

- g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.

**3. Substansi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial dan Penyuluhan, mempunyai tugas :**



- a. Menyusun program dan kegiatan substansi pengelolaan sumber dana bantuan sosial dan penyuluhan,
- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis pengelolaan sumber dana bantuan sosial dan penyuluhan;
- c. Melaksanakan penyusunan data pengelolaan sumber dana bantuan sosial dan penyuluhan;
- d. Melaksanakan layanan rekomendasi dan/atau izin pengumpulan sumbangan sosial;
- e. Melaksanakan pengelolaan sumber dana bantuan sosial untuk Pembangunan kesejahteraan sosial;
- f. Melaksanakan verifikasi calon penerima dana hibah dan bantuan sosial;
- g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.

**5. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENGELOLAAN DATA**

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Pengelolaan Data mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang Pemberdayaan Sosial dan Pengelolaan Data yang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang

- pemberdayaan sosial dan pengelolaan data;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin dan pengelolaan data;
  - c. Pelaksanaan verifikasi data penerima bantuan iuran kesehatan;
  - d. Pengelolaan data bidang sosial;
  - e. Pelaksanaan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin;
  - f. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
  - g. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan nilai – nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
  - h. Pelaksanaan pemberian izin ziarah taman makam pahlawan;
  - i. Pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
  - j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pengelompokan substansi bidang pemberdayaan sosial dan pengelolaan data menyelenggarakan uraian tugas yang terdiri atas:

**1. Substansi Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin, mempunyai tugas:**

- a. Menyusun program dan kegiatan substansi penanganan dan pemberdayaan fakir miskin;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis penanganan dan pemberdayaan fakir miskin;
- c. Melaksanakan penyusunan data dan pemetaan fakir miskin dan orang tidak mampu;
- d. Melaksasnakan verifikasi dan validasi data penerima bantuan iuran kesehatan dan program penanganan kemiskinan lainnya;
- e. Melaksanakan fasilitasi penyaluran kartu jaminan sosial kesehatan dan kartu keluarga Sejahtera kepada penerima bantuan iuran kesehatan;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin;
- g. Melaksanakan penatausahaan bantuan beras



sejahtera;

- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.

**2. Substansi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas:**

- a. Menyusun program dan kegiatan substansi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- c. Melaksanakan penyusunan data potensi sumber kesejahteraan sosial;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan dan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- e. Melaksanakan fasilitasi pembentukan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
- f. Menyiapkan proses penerbitan surat keterangan tanda terdaftar dan izin operasional lembaga kesejahteraan sosial;
- g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.

**3. Substansi Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan Pengelolaan Data, mempunyai tugas:**

- a. Menyusun program dan kegiatan substansi kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan pengelolaan data;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- c. Melaksanakan pengelolaan data sosial;
- d. Melaksanakan pembinaan penanaman nilai – nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
- e. Melaksanakan penyusunan data pahlawan, perintis kemerdekaan, keluarga perintis, keluarga pahlawan dan veteran;

- f. Melaksanakan fasilitasi penyaluran bantuan/santunan anggota Legiun Veteran Republik Indonesia dan Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia;
- g. Melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana taman makam pahlawan;
- h. Menyiapkan proses penerbitan izin ziarah taman makam pahlawan;
- i. Menyelenggarakan peringatan hari pahlawan dan hari kesetiakawanan sosial nasional;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan profil dan Sejarah pejuang dan perintis kemerdekaan;
- k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.

**2.1.2 SUMBER DAYA DINAS SOSIAL KOTA BALIKPAPAN**

**1. SUMBER DAYA MANUSIA**

**Tabel 2.1**  
**BERDASARKAN JABATAN**

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki (L)	Perempuan (P)
1	Kepala Dinas	1	-
2	Sekretaris	1	-
3	Kepala Bidang	2	1
4	Kepala Sub Bagian	-	1
5	Pejabat Fungsional (Pekerja Sosial/Penyuluh Sosial/Perencana	5	5
6	Staf Pelaksana	4	4
7	ASN P3K	7	7
8	NON ASN	4	3

Data Sub bag Umum Dinsos, 2025

**Tabel 2.2**

(BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN)

JENIS KEPEGAWAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN									JUMLAH
	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	S D	
PNS / CPNS	4	10	3	1	-	-	6	-	-	24
PPPK	-	3	1	1	-	-	6	-	-	14
NON ASN	-	1	-	-	-	1	3	-	2	7
JUMLAH	4	14	4	2	-	1	15	-	5	45

Data Sub Bag Umum Dinsos, 2025

Tabel 2.3  
(BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN/RUANG)

NO	PANGKAT/GOL/RUANG	JUMLAH	JUMLAH SELURUHNYA	KETERANGAN
1.	IV/a	3	5	-
	IV/b	1		
	IV/c	1		
2.	III/a	5	15	-
	III/b	4		
	III/c	1		
	III/d	5		
NO	PANGKAT/GOL/RUANG	JUMLAH	JUMLAH SELURUHNYA	KETERANGAN
3.	II/a	-	4	-
	II/b	-		
	II/c	-		
	II/d	4		
4.	PPPK:		14	-
	IX	4		
	VII	1		
	V	6		
		3		

	I			
5.	Tenaga Bantuan	7	7	-
<b>JUMLAH</b>		<b>45</b>	<b>45</b>	

Data Sub Bag Umu Dinsos, 2025

Tabel 2.4  
BERDASARKAN ESELON

NO	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1.	II	1	
2.	III	4	
3.	IV	1	

Data Sub Bag Umu Dinsos, 2025

Tabel 2.5  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

NO	KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Fungsional Keahlian			
	a. Pertama	4	5	9
	b. Muda	3	2	5
	c. Madya	-	-	-
	d. Utama			

Data Sub Bag Umu Dinsos, 2025

Dari data di atas dapat dilihat bahwa sudah terdapat sebaran pegawai Dinas Sosial di masing – masing bidang, baik itu pejabat struktural maupun pejabat struktural dan staf. Namun secara kuantitas, jumlah tersebut masih perlu ditambah khususnya untuk jabatan pegawai fungsional pekerja sosial dan penyuluh sosial.

**2. SARANA DAN PRASARANA**

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Aset yang Dimiliki dan Kondisi**

<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Unit</b>	<b>Ket</b>
1	Makam Pahlawan	1	Luas 1.000.00 M2 (1950)
2	Tanah/Bangunan Mess/ Wisma/Asrama	1	Luas 1.738.00 M2 (1970)
3	Tanah Bangunan Tempat kerja Lainnya	1	Luas 16.580.00 M2 (1981)
4	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1	Luas 450.00 M2 (1985)
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Luas 10.000.00 M2 (2007)
6	Bangunan Gedung kantor Permanen	1	Luas 1260 M2 (Bangunan Rumah Dinas 35 Unit)
7	Bangunan Gedung kantor Permanen	1	Luas 70 M2 (Bangunan Rumah 1 Unit)
8	Bangunan Gedung kantor Permanen	1	Luas 200 M2 (Bangunan Rumah 4 Unit)
9	Bangunan Gedung kantor Permanen	1	Luas 617 M2 (Bangunan Rumah LBK)
10	Bangunan Gedung kantor Permanen	1	Luas 200 M2 (Bangunan Rumah 4 unit) Tanah Milik Pemda
11	Bangunan Gedung kantor Permanen	1	Luas 617 M2 (Kantor KPM)
12	Bangunan Gedung kantor Permanen	1	Luas 500 M2 (Tingkat 1 BPBK) (Tingkat 2 DKPP)
13	Bangunan Gedung Lain- Lain	1	Luas 144 M2 (Berdasarkan Penilaian KJPP 2012)
14	Bangunan Gedung Tempat kerja lainnya Permanen	1	Rumah Singgah
15	Bangunan Gedung Tempat kerja lainnya Permanen	1	Rumah Singgah
16	Mobil KT 1401 A (Mini Bus Penumpang 14 orang ke bawah)	2	Baik
17	Mobil KT 7212 A (Mini bus Penumpang 14 orang kebawah)	1	Baik
18	Mobil Truck+ Attachment KT 8347 H	1	Baik
19	Sepeda Motor (KT 2131 A)	7	Baik
20	Sepeda Motor (KT 2133 A)	5	Baik

21	Sepeda Motor (KT 2134 A)	2	Baik
22	Televisi (Tosiba)	1	Baik
23	Televisi (LG)	1	Baik
24	Televisi (LG/HDR10 Pro)	1	Baik
25	Komputer (Asus)	3	Baik
26	Komputer (HP desktop PC 280 G3 Small)	2	Baik
27	Personal Komputer lainnya (Lenovo)	16	Baik
28	Komputer (Lenovo)	5	Baik
29	Komputer (Lenovo)	5	Baik
30	Komputer (Lenovo)	3	Baik
31	Printer (Printer Standar)	4	Baik
32	Printer (Printer Multifungsi)	2	Baik
33	Printer (Printer Dot Maxrik)	1	Baik
34	Printer (Printer L 5190)	7	Baik
35	Printer (Epson L3110)	16	Baik
36	Printer (Epson L311)	2	Baik
37	Printer (Epson L3110)	8	Baik
38	Printer (Epson L 3250)	6	Baik
39	Pompa air (Sonya/p H151 AD)	1	Baik
40	AC (Akari)	5	Baik
41	AC (Panasonic)	4	Baik
42	Dispenser (Sanken)	2	Baik
43	Dispenser (Sanken)	3	Baik
44	Dispenser (Panasonic)	1	Baik
45	Camera (Electronik Projction Screen Vesual Callaboration)	2	Baik
46	Camera digital (Canon)	2	Baik
47	Tempat Tidur besi (Tempat Tidur pasien)	1	Baik
48	Sound System (Boretone BT/51BWR )	1	Baik
49	Sound System (EON715)	1	Baik
50	Sound System (Baretone)	1	Baik
51	Kursi kerja pejabat Eselon (III)	7	Baik
52	Kursi kerja pejabat Eselon III Informa Counci Maneger (Hair)	4	Baik
53	Kursi kerja pegawai No struktural (Informa London	21	Baik

	sfat Chair Oranye)		
54	Kursi Besi/ Metal (Kursi Roda)	1	Baik
55	Kursi Roda (Gea/PS/950 BPQ - 46	3	Baik
56	Mesin Absensi/Sulution/ X302	3	Baik
57	Lemari Es (Tosiba/GalxD7)	1	Baik
58	Lemari Es (Sanken)	1	Baik
59	Lemari Es (Aquad)	1	Baik
60	Gordy/Kray (kain)	5	Baik
61	Gordy/Kray (bahan Odelia )	1	Baik
62	Lemari Arsip (VIP)	1	Baik
63	Lemari Arsip (VIP)	6	Baik
64	Alat Penghancur kertas (Krisbow 5 290 )	1	Baik
65	1 Paker Stand Speker 2	1	Baik
66	Microphone tablestand (Kondensor )	1	Baik
67	Lemari Pakaian ( Kayu)	20	Baik
68	Lemari Pakaian	20	Baik
69	Mesin Pemotong Rumput	1	Baik
70	Kipas Angin ( Cosmas)	5	Baik
71	Riko Cooker Gas 16	1	Baik
72	Kompore Gas besi Cor 1 mata	1	Baik
73	Kompore Tunggu mawar 2 mata	2	Baik
74	Kompore gas besi Cor 2 Mata	2	Baik
75	CCTV Camera Control Televisi Sytem (DVK Hikvision) 16 KH Ps	1	Baik
76	CCTV Camera Control Televisi Sytem (HikVISION)	1	Baik
77	CCTV Camera Control Televisi Sytem (HikVISION)	1	Baik
78	CCTV Camera Control Televisi Sytem (DVK Hikvision 16 KH Ps)	1	Baik
79	Papan Pengumuman	10	Baik
80	Papan Pengumuman (Costum)	10	Baik
81	mesin cuci (S amsung)	1	Baik
82	Laptop (Hp)	5	Baik
83	Laptop (Lenovo)	1	Baik
84	Laptop (Acer)	3	Baik

85	Tablet PC (Samsung Galaxy Tab a,b)	1	Baik
86	Tablet PC (Samsung)	1	Baik
87	Harddisk (Expasion)	6	Baik
88	Harddisk (W)	1	Baik
89	Kasur/Sprin bed	11	Baik
90	Kasur/Sprin bed	4	Baik
91	Tenda	5	Baik
92	Tenda	5	Baik
93	Tiang Lampu (Solar Cell)	2	Baik
94	Scanner (Epson ds410)	1	Baik
95	Scanner (Epson ds L130)	4	Baik
96	Lemari Display (Kayu)	1	Baik
97	Tandon air	2	Baik
98	Wireless (Champion)	1	Baik
99	Mic conference	1	Baik
100	UPS (Prolink)	7	Baik

Data Sub Bag Umu Dinsos, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial Kota Balikpapan telah memiliki aset yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, aset – aset tersebut masih tetap kurang terutama untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi PPKS terlantar. Dinas Sosial sangat mengharapkan tersedianya bangunan permanen sebagai Pusat Rehabilitasi Sosial Terpadu dengan fasilitas perawatan yang mendukung sehingga proses pelayanan kepada orang terlantar juga dapat berjalan dengan optimal.

### 2.1.3 KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA BALIKPAPAN

Berikuti ini adalah tabel yang menggambarkan hasil rekapitulasi pendataan PPKS tahun 2022 – 2024 yang merupakan hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang bekerja sama dengan mitra – mitra Dinas Sosial di lapangan.



Tabel 2.7

REKAPITULASI DATA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)					
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022 sd 2024					
NO	JENIS PPKS	SATUAN	TAHUN		
			2022	2023	2024
1	Anak Balita Terlantar	Orang	117	113	26
2	Anak Terlantar	Orang	1044	1052	1069
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	Orang	42	120	136
4	Anak Jalanan	Orang	37	43	96
5	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	Orang	308	205	314
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau di Perla	Orang	24	4	3
7	Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus	Orang	24	42	81
8	Lanjut Usia Terlantar	Orang	2,675	2,232	2003
9	Penyandang Disabilitas / Cacat	Orang	960	982	1185
10	Tuna Susila	Orang	0	2	1
11	Gelandangan	Orang	4	44	11
12	Pengemis	Orang	23	5	3
13	Pemulung	Orang	173	57	20
14	Kelompok Minoritas	Orang	0	0	0
15	Bekas Warga Binaan Kermasyarakatatan (BWBLK)	Orang	46	7	3
16	Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)	Orang	0	0	0
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Orang	42	1	3
18	Korban Traffing	Orang	0	0	0
19	Korban Tindak Kekerasan	Orang	12	4	3
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Orang	130	222	13
21	Korban Bencana Alam	Orang	14,636	875	1653
22	Korban Bencana Sosial	Orang	483	122	363
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Orang	609	1061	509
24	Fakir Miskin	Orang	127,570	114265	106738
25	Keluarga Bermasalah Psikologis	Orang	2	20	10
26	Komunitas Adat Terpencil	Orang	0	0	0
	JUMLAH		148,961	121,478	114,243

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara total jumlah PPKS pada tahun 2024 terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023. Namun terdapat beberapa jenis PPKS yang terjadi peningkatan jumlah setiap tahunnya, misalnya jumlah anak terlantar yang meningkat dari tahun – tahun sebelumnya. Demikian halnya dengan anak yang berhadapan dengan hukum serta anak jalanan. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah dari pemerintah Kota Balikpapan khususnya Dinas Sosial dalam meningkatkan pelayanan dan mengurangi jumlah PPKS terlantar.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial sosial dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan setiap tahun. Capaian IKU Dinas Sosial tersebut adalah:

Tabel 2.7  
Capaian IKU Tahun 2022

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dasar Orang dengan Kedisabilitasan, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, dan Tuna Sosial	Persentase PMKS yang mendapat Pelayanan Sosial	Persen	62	81.03	135.05

2	Pemulihan Nilai – Nilai Luhur (Restorasi Sosial)	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola	Persen	79	79	100
3	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	28	30.29	108.17

**Tabel 2.8**  
**Capaian IKU Tahun 2023**

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dasar Orang dengan Kedisabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, dan Tuna Sosial	Persentase PMKS yang mendapat Pelayanan Sosial	Persen	82	73.42	89.53
2	Pemulihan Nilai – Nilai Luhur (Restorasi Sosial)	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola	Persen	80	80	100
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Nilai	70	62.74	89.62

**Tabel 2.9**  
**Capaian IKU Tahun 2024**

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dasar Orang dengan Kedisabilitasan, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, dan Tuna Sosial	Persentase PMKS yang mendapat Pelayanan Sosial	Persen	83	84.04	101.25
2	Pemulihan Nilai – Nilai Luhur (Restorasi Sosial)	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola	Persen	82	82	100
3	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	75	69.60	92.80

Realisasi keuangan tahun 2022 sd 2024

Dinas Sosial Kota Balikpapan memiliki tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif, efisien dan akuntabel. Kinerja Dinas Sosial Kota Balikpapan dapat dilihat melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam memberikan pelayanan dan penanganan yang maksimal bagi masyarakat khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Adapun kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Pemberian pelayanan rehabilitasi sosial dasar kepada anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, gelandangan pengemis dan rehabilitasi sosial lainnya selain kepada korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial berupa:

1. Penyediaan permakanan;
2. Penyediaan sandang;
3. Penyediaan alat bantu;
4. Penyediaan pelayanan reunifikasi keluarga;
5. Penyediaan layanan rujukan;
6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial;
7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga PPKS;
8. Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;;
9. Pemberian layanan data dan pengaduan;
10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga;
11. Penyediaan perbekalan kesehatan.

#### **B. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial :**

Fasilitasi pemberian perlindungan dan jaminan sosial kepada PPKS berupa:

1. Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat;
2. Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga;
3. Pengelolaan data fakir miskin;
4. Fasilitasi bantuan jaminan sosial bagi pekerja rentan miskin;
5. Fasilitasi proses pengangkatan anak (adopsi) untuk diusulkan ke provinsi;
6. Penyediaan kebutuhan dasar bagi korban bencana berupa makanan, sandang, penyediaan tempat penampungan pengungsi;
7. Pemberian layanan dukungan psikososial bagi korban bencana;
8. Penanganan khusus bagi kelompok rentan korban bencana;
9. Penyediaan tempat penampungan pengungsi;
10. Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana;
11. Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
12. Peningkatan kompetensi Taruna Siaga Bencana dalam Penanganan Bencana.

### **C. Bidang Pemberdayaan Sosial:**

Penguatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial berupa:

1. Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga;
2. Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat;
3. Fasilitasi pemberian penghargaan dan santunan bagi warakawuri/keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan janda duda perintis kemerdekaan;
4. Pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai – nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
5. Fasilitasi pengembangan pusat kesejahteraan sosial;
6. Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial perseorangan;
7. Fasilitasi pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah;
8. Pembinaan teknis sumber daya manusia sumber kesejahteraan sosial daerah;
9. Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang;
10. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
11. Pemberian pelayanan ziarah dan studi di Taman Makam Pahlawan.

### **D. Pelayanan Kesekretariatan berupa :**

1. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
2. Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan operasional;
3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di Dinas Sosial;
4. Fasilitasi perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas;
5. Fasilitasi layanan pengaduan dari masyarakat.

#### **2.1.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN**

Kelompok sasaran layanan yang menjadi tugas dari Dinas Sosial Kota Balikpapan adalah:

1. **Anak balita terlantar:** Anak yang berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang

ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan sehingga hak – hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

2. **Anak terlantar:** Anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh kedua orang tua / keluarga atau anak yang kehilangan hak asuh dari orang tua / keluarga.
3. **Anak yang berhadapan dengan hukum:** Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
4. **Anak jalanan:** Anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan dan/atau hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari – hari.
5. **Anak dengan kedisabilitas yaitu:** Seseorang yang( )belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi – fungsi jasmani, rohani, maupun sosial secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.



6. **Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah:** Anak yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan,

diperlakukan salah, atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

7. **Anak yang memerlukan perlindungan khusus:** Anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/sekual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

8. **Lanjut usia terlantar:** seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor – faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
9. **Penyandang disabilitas:** Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
10. **Tuna susila:** Seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan implan uang, materi atau jasa.



11. **Gelandangan:** Orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

12. **Pengemis:** Orang yang mendapat penghasilan meminta – minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
13. **Pemulung:** orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang – barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan, dan/atau pasar – pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
14. **Kelompok minoritas:** Kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial , seperti gay, waria, dan lesbian.
15. **Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan:** Seseorang yang telah selesai menjalani masa pidanya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
16. **Orang dengan HIV/AIDS (ODHA):** Seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan

kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

17. **Korban penyalahgunaan NAPZA:** Seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di luar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
18. **Korban trafficking:** Seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
19. **Korban tindak kekerasan:** Seseorang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan baik akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk – bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
20. **Pekerja migran bermasalah sosial:** Pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.



21. **Korban bencana alam:** Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang

disebabkan oleh alam. Misalnya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

22. **Korban bencana sosial:** Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.
23. **Perempuan rawan sosial ekonomi:** seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah, atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari – hari.
24. **Fakir miskin:** Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi



kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

25. **Keluarga bermasalah sosial psikologis:** Keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama suami – istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas – tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan lancar.

#### 2.1.5 MITRA PELAYANAN DINAS SOSIAL

Dalam memberikan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Dinas Sosial Kota Balikpapan selalu bekerja sama secara harmonis dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yaitu:

1. **Pekerja sosial profesional:** Adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas – tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
2. **Pekerja sosial masyarakat:** Warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan untuk membantu pemerintah dan masyarakat( ) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. **Taruna Siaga Bencana:** Relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.
4. **Karang Taruna:** Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk generasi muda yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
5. **Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga:** Suatu lembaga/organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi, dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar – benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.
6. **Keluarga Pioner:** Keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara – cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.
7. **Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat:** Sistem kerjasama antar keperangkat pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.

8. **Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial:** Adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
9. **Penyuluh Sosial:** Penyuluh sosial fungsional adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
10. **Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan:** Seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial daerah provinsi dan/atau Dinas Sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan.
11. **Dunia Usaha:** Organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.
12. **Tenaga Pelopor Perdamaian:** Relawan sosial masyarakat yang diberikan tugas untuk melakukan penanganan konflik sosial.

#### 2.1.6 TUGAS MITRA DINAS SOSIAL



**1. Pendataan, Verifikasi, dan Validasi PPKS:** Pendataan, verifikasi dan validasi PPKS dilakukan agar pemberian bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran.

**2. Pendampingan PPKS:** Pendampingan bertujuan untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada PPKS agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian mereka. Pendampingan tersebut meliputi pendampingan psikososial, pendampingan kesehatan, pendampingan pendidikan dan pendampingan ekonomi.

3. **Penyaluran bantuan sosial:** Mitra Dinas Sosial berperan dalam fasilitasi dalam penyaluran bantuan sosial kepada PPKS yang telah terverifikasi dan validasi. Bantuan sosial tersebut berupa bantuan tunai, bantuan sembako, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan bantuan – bantuan lainnya.
4. **Koordinasi dengan Stakeholder:** Mitra Dinas Sosial tersebut sangat berperan dalam koordinasi dengan pihak terkait misalnya tokoh masyarakat, lembaga swasta dan perangkat daerah lainnya.

**5. Laporan dan evaluasi:** Mitra Dinas Sosial menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tiap bulan untuk bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan di masa yang akan datang.

**2.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bidang Sosial**

Untuk mencapai keberhasilan dalam pelayanan sosial, sangat ditentukan oleh banyak faktor baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Oleh sebab itu, perlu dilakukan edentifikasi agar dapat diketahui faktor – faktor yang termasuk dalam kategori kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Analisis yang dapat digunakan adalah analisis SWOT. Analisis SWOT adalan metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

Kekuatan (*strengths*) adalah potensi internal yang dapat dimanfaatkan sebagai suatu keuntungan dalam mencapai tujuan organisasi. Kelemahan (*weaknesses*) adalah faktor internal yang menempatkan organisasi pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan yang lain. Peluang (*opportunities*) adalah faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi. Ancaman (*threats*) adalah faktor eksternal di luar lingkungan organisasi yang dapat menyebabkan masalah atau merugikan organisasi. Adapun alanisis dari masing – masing faktor tersebut antara lain:

**Tabel 2.7**  
**Kekuatan**

No	Kekuatan
1	Dinas Sosial Merupakan Pengampu Urusan Wajib Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial
2	Adanya regulasi berupa Peraturan Daerah Kota Balikpapan dan Peraturan Wali Kota Balikpapan yang mengatur tentang pelayanan PPKS di Kota Balikpapan
3	Dukungan yang maksimal dari mitra – mitra Dinas Sosial Kota Balikpapan di lapangan
4	Tersedianya alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Balikpapan

**Tabel 2.8**

**Kelemahan**

No	Kelemahan
1	Belum memadainya beberapa sarana pendukung pelayanan khususnya kantor dan unit – unit pelayanan sosial terpadu
2	Masih terbatasnya jumlah SDM aparatur pelayanan kesejahteraan sosial karena terbatasnya jumlah SDM yang memiliki <i>background</i> pendidikan kesejahteraan sosial
3	Minimnya( )minat dan motivasi masyarakat untuk menjadi tenaga profesionalisme bidang sosial yang kompeten sesuai bidang pelayanan yang dibutuhkan
4	Kurangnya kegiatan pelatihan/bimtek peningkatan kapasitas bagi tenaga kesejahteraan sosial
5	Belum adanya SOP Pelayanan yang komprehensif yang digunakan sebagai standar / pedoman dalam memberikan pelayanan sosial bagi PPKS

**Tabel 2.9**  
**Peluang**

No	Peluang
1	Terdapat garis koordinasi yang jelas sebagaimana digambarkan dalam struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi di Dinas Sosial Kota Balikpapan
2	Adanya dukungan dan kerja sama yang baik antar perangkat daerah dalam memberikan pelayanan sosial kepada PPKS
3	Banyaknya organisasi / lembaga swasta di Kota Balikpapan yang dapat diarahkan untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan permasalahan sosial
4	Perkembangan sistem informasi teknologi yang semakin maju sehingga memudahkan dalam akses pendataan maupun pelayanan PPKS
5	Dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Kalimantan Timur dalam penyaluran bantuan sosial
6	Penurunan angka kemiskinan setiap tahun di Kota Balikpapan

**Tabel 2.10**  
**Ancaman**

No	Ancaman
1	Meningkatnya jumlah PPKS karena kota Balikpapan merupakan beranda Ibu Kota Nusantara (IKN)
2	Masih belum optimalnya penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat
3	Terbatasnya jumlah panti – panti sosial milik pemerintah dan swasta
4	Terbatasnya kewenangan Kota Balikpapan dalam memberikan pelayanan SPM kepada PPKS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018
5	Masih adanya potensi bencana di Kota Balikpapan khususnya banjir, tanah longsor dan kebakaran

Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal tersebut, maka beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah:

1. Menjalankan regulasi yang telah ditetapkan secara konsisten dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait;
2. Memberikan pelatihan peningkatan kompetensi kepada seluruh mitra Dinas Sosial;
3. Mengoptimalkan anggaran yang ada dengan sebagian besar dialokasikan untuk kegiatan – kegiatan prioritas;
4. Mengajukan penambahan dan perbaikan unit – unit pelayanan sosial dalam rangka memaksimalkan pelayanan;
5. Mengajukan penambahan pekerja sosial dan penyuluh sosial sesuai kebutuhan;
6. Menyusun SOP dan Rencana Aksi untuk setiap program dan kegiatan yang telah disusun;
7. Meningkatkan kerja sama dengan perusahaan dan lembaga – lembaga swasta dalam memberikan bantuan – bantuan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kepada masyarakat Kota Balikpapan;
8. Membangun aplikasi PPKS yang lebih transparan dan akuntabel dalam proses verifikasi dan validasi calon penerima bantuan;
9. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penanganan PPKS;
10. Meningkatkan jumlah anggota TAGANA sehingga penanganan korban bencana dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

Dari beberapa strategi yang dilakukan untuk merebut peluang yang ada dan mengatasi ancaman yang mungkin timbul, serta mengurangi kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor kunci

keberhasilan atas strategi tersebut adalah:

1. Adanya komitmen dan kerjasama yang sinergis dari pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Sosial;
2. Tetap mengoptimalkan pelayanan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada;
3. Selalu konsisten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah diberikan.

**2.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Permasalahan sosial adalah suatu keadaan dalam masyarakat yang tidak diinginkan, mengganggu keteraturan sosial, dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan bersama. Permasalahan sosial merupakan salah satu permasalahan yang wajib mendapat perhatian dari pemerintah. Permasalahan sosial tersebut dengan mudah sering kali kita jumpai di tengah – tengah masyarakat, misalnya: fakir miskin, anak jalanan, gelandangan pengemis dan penyandang disabilitas.

Dalam aspek perlindungan sosial, Kota Balikpapan melalui Dinas Sosial terus berupaya memberikan perlindungan yang maksimal bagi kelompok rentan dan menekan angka kemiskinan melalui berbagai program sosial yang telah dijalankan selama ini yaitu program rehabilitasi sosial, program perlindungan sosial dan program pemberdayaan sosial. Namun upaya ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti terbatasnya jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) misalnya pekerja sosial dan penyuluh sosial. Selain itu, belum tersedianya fasilitas rehabilitasi sosial yang representatif juga turut mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan. Kondisi lain yang dihadapi adalah cakupan bantuan sosial belum menysasar seluruh PPKS yang ada serta pemanfaatannya relatif belum efektif untuk meningkatkan derajat fakir miskin. Selain itu, program perlindungan sosial yang ada selama ini lebih banyak berfokus pada bantuan yang bersifat karitatif dibandingkan dengan pemberian bantuan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Kondisi – kondisi tersebut dapat menjadi permasalahan yang serius jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat.

Untuk lebih menjelaskan permasalahan – permasalahan yang ada tersebut, Dinas sosial Kota Balikpapan telah memetakan permasalahan sosial tersebut dengan mencari apa yang menjadi akar masalahnya sehingga dapat diberikan solusi yang lebih komprehensif. Adapun pemetaan permasalahan yang ditemukan di Dinas Sosial Kota Balikpapan adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 2.11**

**Pemetaan Masalah**

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
Belum Optimalnya Pelayanan dan Penanganan PPKS	Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial bagi PPKS terlantar	Masih terbatasnya daya tampung panti sosial milik provinsi
	Belum optimalnya penyaluran bantuan yang tepat sasaran	Terbatasnya jumlah tim verifikasi dan validasi data di lapangan
	Belum optimalnya pemanfaatan bantuan sosial ekonomi dalam penanggulangan kemiskinan	Terbatasnya akses KPM dalam pemanfaatan program pemberdayaan sosial khususnya yang bersifat stimulan modal usaha dan pendampingan
	Belum optimalnya perlindungan sosial korban bencana	Belum optimalnya koordinasi dan proses bisnis penanganan bencana
	Belum optimalnya perlindungan sosial yang adaptif	Program perlindungan sosial masih berfokus pada bantuan sosial yang bersifat karitatif dan belum seluruhnya menyasar pada kelompok rentan

Setelah memetakan permasalahan dan akar masalah, kemudian dilakukan penentuan isu – isu strategis yang terjadi dewasa ini. Penentuan isu strategis tersebut sangat penting agar organisasi dapat merumuskan arah kebijakan yang tepat dan berkelanjutan. Penentuan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi organisasi wajib diperhatikan atau dikedepankan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) karena dapat berdampak secara significant dan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar dan bahkan akan menghilangkan peluang/potensi untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Oleh sebab itu Dinas Sosial Kota Balikpapan telah memetakan permasalahan dan isu strategis sebagai dasar arah kebijakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025 – 2029. Permasalahan dan Isu Strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.12**

**Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial Kota Balikpapan**

<b>Potensi yang Menjadi Kewenangan Dinas Sosial</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Isu KLHS yang Relevan</b>	<b>Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan</b>			<b>Isu Strategis</b>
			<b>Global</b>	<b>Nasional</b>	<b>Regional</b>	
Dinas Sosial Merupakan Pengampu Urusan Wajib Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial  Tingkat Kemiskinan Kota Balikpapan Tahun 2024 sebesar 2,23 %  Adanya regulasi daerah yang mendukung program penanggulangan kemiskinan antara lain Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2020	Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial bagi PPKS terlantar  Belum optimalnya penyaluran bantuan tepat sasaran  Belum optimalnya pemanfaatan bantuan sosial ekonomi dalam penanggulangan kemiskinan  Belum optimalnya perlindungan sosial korban bencana  Belum optimalnya perlindungan sosial yang adaptif	Upaya perlindungan sosial kelompok rentan masih perlu dioptimalkan	Demografi global  Urbanisasi dunia	Rendahnya kualitas sumber daya manusia  Pergeseran struktur kelas masyarakat	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Penguatan SDM berdaya saing dan perlindungan sosial kelompok masyarakat rentan



Permasalahan dan isu strategis di atas diperoleh melalui analisis internal berupa identifikasi permasalahan dan isu strategis berdasarkan data yang ada di internal Dinas Sosial maupun analisis eksternal berupa isu – isu terupdate yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri.

Isu – isu strategis yang telah disebutkan dalam tabel di atas diharapkan dapat mendukung penentuan arah kebijakan yang akan disusun untuk mengatasi permasalahan yang ada. Secara spesifik, tujuan perumusan isu strategis tersebut adalah:

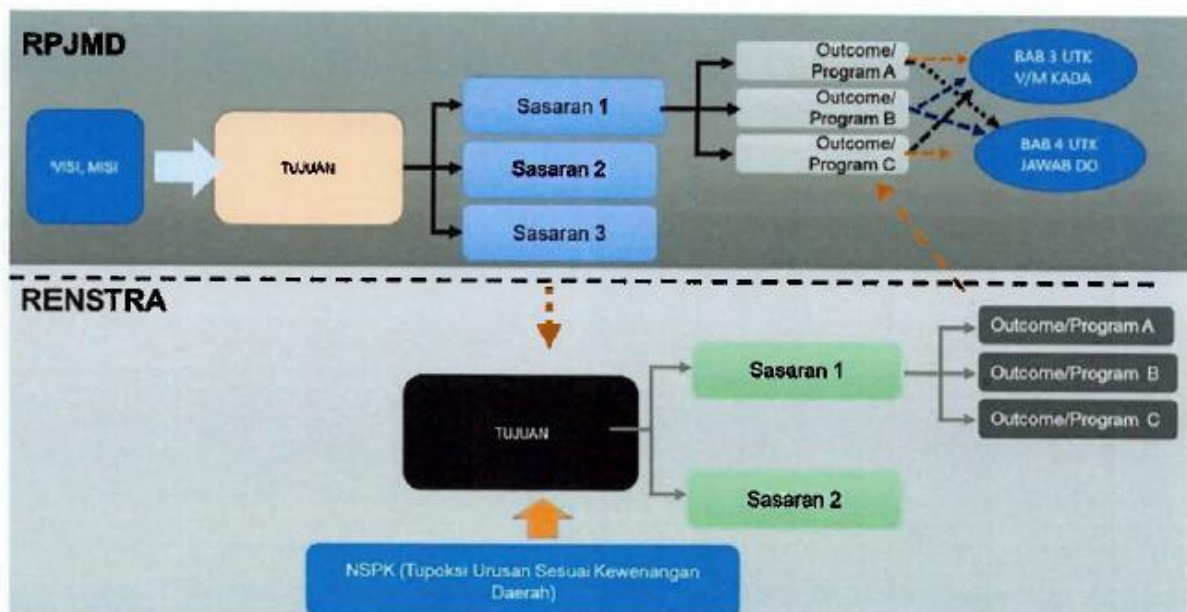
1. Memastikan proses perencanaan yang tepat sasaran dan responsif;
2. Menyelaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Dinas Sosial Kota Balikpapan.

BAB III  
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**3.1 TUJUAN RENSTRA DINAS SOSIAL TAHUN 2025 - 2029**

Visi dan misi RPJMD Kota Balikpapan tahun 2025 – 2029 adalah: **“Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman.”** Adapun misi RPJMD yang terkait dengan Dinas Sosial Kota Balikpapan adalah misi ke – 3 yaitu: **“Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan Terdidik.”** Salah satu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Balikpapan adalah perekonomian daerah yang tumbuh berkeadilan dan menyejahterakan dengan sasarannya adalah meningkatnya kondusifitas dan perlindungan sosial masyarakat.

Perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang tepat di Perangkat Daerah sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam visi dan misi kepala daerah. Adapun hubungan antara tujuan dan sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Sosial dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Balikpapan merupakan penjabaran dan implementasi operasional dari visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Balikpapan. Adapun tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan pada Renstra periode tahun 2025 – 2029 adalah: **“Meningkatnya Pemberdayaan Sosial”**.

Tujuan strategis yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2025 – 2029 telah selaras dengan salah satu tujuan yang

ditetapkan dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2025 – 2029 yaitu **Meningkatnya Kondusifitas dan Perlindungan Sosial**. Keterkaitan antara sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Tahun 2025 – 2030**

NSPK & Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	2	3	4
Meningkatnya Kondusifitas dan Perlindungan Sosial	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial		Persentase Graduasi KPM
		Meningkatnya kualitas layanan kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang terlayani
		Meningkatnya persentase penerapan nilai kepahlawanan dalam kehidupan sosial	Persentase Penerapan Nilai Kepahlawanan dalam Kehidupan Sosial
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa tujuan utama Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan tahun 2026 – 2029 adalah meningkatnya pemberdayaan Sosial dengan indikatornya persentase graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemberdayaan sosial adalah proses meningkatkan kemandirian dan kemampuan PPKS, terutama yang miskin dan rentan, agar mereka dapat hidup lebih mandiri dan berdaya. Proses ini dilakukan bukan hanya dengan pemberian bantuan, melainkan membekali masyarakat dengan keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya melalui program dan pendampingan yang baik sehingga mereka dapat mengembangkan potensinya secara berkelanjutan.

Pemberdayaan sosial ini juga meliputi pemberdayaan terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di masyarakat berupa optimalisasi peran panti – panti sosial, rumah singgah, forum CSR,

Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan PSKS lainnya dalam upaya mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial di masyarakat. Selain itu, pemberdayaan sosial juga termasuk peningkatan penerapan nilai kepahlawanan dalam kehidupan sosial dengan memberikan penghormatan dan penghargaan yang tinggi bagi para pahlawan yang telah gugur maupun para Legiun Veteran yang masih hidup. Seluruh proses pemberdayaan sosial ini hanya dapat dilakukan apabila terdapat kondusifitas dan perlindungan sosial yang baik di masyarakat.

Kondusifitas dan perlindungan sosial yang baik akan menciptakan ruang tumbuh bagi proses pemberdayaan sosial. Disamping itu, kondusifitas dan perlindungan sosial yang baik akan memudahkan akses terhadap layanan – layanan sosial dan perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah misalnya layanan kebutuhan dasar, layanan kesehatan dan layanan pendidikan. Sebaliknya, PPKS akan lebih nyaman dan percaya diri dalam berpartisipasi dalam kegiatan – kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat karena didukung oleh lingkungan yang aman, tertib dan harmonis.

Indikator yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dalam mengukur pencapaian peningkatan pemberdayaan sosial adalah dengan meningkatnya persentase graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Graduasi adalah berakhirnya masa kepesertaan KPM sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah yang dapat terjadi karena:

- 1) Graduasi secara alamiah yang terjadi secara otomatis karena perubahan kondisi keluarga sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sebagaimana telah diatur dalam Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018;
- 2) Graduasi karena pemutakhiran sosial ekonomi (mandiri), dimana hasil penilaian menyatakan bahwa KPM telah mencapai kondisi ekonomi mandiri sesuai indikator yang telah ditentukan.

Semakin banyak jumlah KPM yang tergraduasi, artinya semakin besar penurunan jumlah PPKS miskin, dengan demikian proses pemberdayaan PPKS di masyarakat semakin baik.

### **3.2 SASARAN RENSTRA DINAS SOSIAL TAHUN 2025 - 2029**

Sasaran strategis hasil yang ingin dicapai secara lebih terukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran strategis tersebut adalah turunan dari tujuan strategis. Sasaran Strategis berfungsi sebagai

arah dan tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian dari suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Sasaran strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja dan outcome dan output yang ingin dicapai. Pada Renstra Dinas Sosial tahun 2029 – 2029 ini, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan yaitu:

1. Meningkatnya kualitas layanan kesejahteraan sosial;
2. Meningkatnya persentase Penerapan nilai kepahlawanan dalam kehidupan sosial;
3. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sasaran pertama dari Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Dinas Sosial adalah meningkatnya kualitas layanan kesejahteraan sosial, dengan indikator kinerja adalah persentase PPKS yang terlayani. Pemberdayaan sosial akan tercapai apabila kualitas layanan kesejahteraan sosial meningkat. Dengan peningkatan kualitas layanan, diharapkan jangkauan penerima layanan akan semakin banyak pula sehingga potensi graduasi PPKS semakin meningkat. Peningkatan kualitas layanan ini dapat dilakukan melalui kerja sama yang sinergis dengan seluruh stakeholder misalnya penguatan peran forum CSR dan lembaga zakat, serta penguatan peran pemerintah baik dalam lingkup pemerintah daerah maupun instansi vertikal lainnya.

Sasaran kedua dari program prioritas yang telah ditetapkan adalah meningkatnya persentase penerapan nilai kepahlawanan dalam kehidupan sosial dengan indikator persentase penerapan nilai kepahlawanan dalam kehidupan sosial. Penerapan nilai kepahlawanan dapat dilakukan dengan kegiatan antara lain : peringatan hari Pahlawan setiap tanggal 10 November, pemeliharaan, rehabilitasi dan pengamanan Taman Makam Pahlawan, serta kegiatan ziarah dan studi di lokasi Taman Makam Pahlawan. Kegiatan kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan jiwa patriotisme, semangat bela negara, dan meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat khususnya masyarakat kota Balikpapan.

Sasaran ketiga adalah meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan indikator nilai AKIP Dinas Sosial. Penilaian AKIP Perangkat Daerah dilakukan untuk mengukur proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan. Kegiatan ini melibatkan dukungan seluruh

unsur pimpinan dan staf dari Dinas Sosial dalam rangka mendukung pelaksanaan program – program prioritas yang telah direncanakan.

### **3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan dan kemampuan Dinas Sosial dalam mengatasi permasalahan - permasalahan sosial secara lebih efisien dan efektif. Strategi diperlukan untuk memilih tindakan yang spesifik untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta solusi yang diperlukan. Strategi merupakan pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Strategi tersebut dapat dilihat dalam penjabaran kebijakan dan program. Beberapa strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra adalah:

1. Optimalisasi proses verifikasi dan validasi PPKS berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN);
2. Peningkatan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), keluarga dan lembaga swasta untuk membantu pemerintah dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
3. Optimalisasi pelayanan rehabilitasi sosial dan peningkatan program pemberdayaan sosial kepada fakir miskin melalui bantuan modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
4. Peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat dengan terciptanya usaha – usaha ekonomi produktif keluarga.

Arah kebijakan merupakan serangkaian prioritas kerja sebagai peta jalan yang ingin dipenuhi. Arah kebijakan tersebut merupakan pedoman, panduan yang ditetapkan oleh suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Arah kebijakan berfungsi sebagai jembatan antara sasaran strategis dengan program atau kegiatan yang lebih operasional.

Berikut adalah strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan dalam rangka mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2026 – 2029:

**Tabel 3.2**  
**Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025 - 2029**

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup	Penguatan sistem perlindungan sosial yang komprehensif terintegrasi, dan tepat sasaran	Peningkatan jumlah KPM Penerima Program Perlindungan Sosial
Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian	Penguatan data sosial kemiskinan daerah yang komprehensif dan termutakhirkan	Optimalisasi proses pendataan, verifikasi dan validasi
Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial		Penguatan program - program pemberdayaan sosial kepada fakir miskin
Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan		Peningkatan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial
Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan		
Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial		

Arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini telah mengacu pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan. Untuk melaksanakan kebijakan – kebijakan tersebut, maka perlu disusun strategi penahapan yang tepat agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Tahapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan dalam mencapai tujuan tersebut adalah sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Penahapan Pelaksanaan Renstra**

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
Optimalisasi penanganan PPKS dan verifikasi dan validasi PPKS berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai sumber data penyaluran bantuan sosial	Pemberdayaan dan peningkatan peran PSKS, keluarga dan lembaga swasta untuk membantu pemerintah dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial	Optimalisasi pelayanan rehabilitasi sosial dan peningkatan program pemberdayaan sosial kepada fakir miskin melalui bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP)	Peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat dengan terciptanya usaha – usaha ekonomi produktif keluarga	Terwujudnya kemandirian ekonomi PPKS dan penurunan jumlah PPKS terlantar di kota Balikpapan

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa fokus kegiatan yang akan dilakukan pada tahun pertama Renstra Dinas Sosial adalah optimalisasi penanganan PPKS melalui penguatan data PPKS. Penguatan data ini dilakukan melalui optimalisasi verifikasi dan validasi data di lapangan dengan melibatkan mitra – mitra Dinas Sosial di seluruh kelurahan dan kecamatan. Setelah data PPKS tervalidasi dan terverifikasi secara akurat, maka program – program pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan program perlindungan dan jaminan sosial dapat berjalan secara lebih efektif dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di kota Balikpapan.



**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG**  
**URUSAN**

**4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 yang mengamanahkan pemberian pelayanan kebutuhan dasar bagi PPKS terlantar khususnya anak terlantar, penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti sosial. Pelayanan kepada PPKS terlantar merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat serta lembaga – lembaga sosial lainnya.

Oleh sebab itu, Dinas Sosial Kota Balikpapan telah menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat mengoptimalkan pelayanan kepada PPKS tersebut. Nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang dicantumkan pada Renstra Dinas Sosial tahun 2026 – 2029 adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renstra Dinas Sosial ini telah berupaya untuk memfasilitasi rencana kerja yang akan dilaksanakan setiap tahunnya dalam rangka mencapai sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan. Demikian pula dengan penyusunan pendanaan telah dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya. Di bawah ini disajikan beberapa matriks yang menggambarkan tentang program, kegiatan, sub kegiatan, target kinerja IKU, target kinerja IKK yang merupakan target – target kinerja yang wajib dicapai setiap tahunnya.

**TABEL 4.1**  
**URAIAN PROGRAM RENSTRA 2025-2029**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	IKM Internal Perangkat Daerah	87,07	88,18	89,18	14.113.204.040	89,39	15.136.590.000	89,59	15.869.970.000	89,80	16.107.113.000	90	16.578.218.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL  Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Ditingkatkan Kompetensinya	78	79	80	1,572,564.000	85	2.480.000.000	90	2.480.000.000	95	2.480.000.000	100	2.480.000.000
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	84	85	86	2.936.482.960	87	3.065.000.000	88	3.467.000.000	89	3.631.400.000	90	3.875.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL  Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	40	50	60	3.749.424.000	70	2.400.000.000	80	2.470.000.000	90	2.530.000.000	100	2.595.000.000
PROGRAM PENANGANAN BENCANA  Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100	100	100	737.636.000	100	760.000.000	100	755.200.000	100	795.000.000	100	785.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN  Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Penerapan Nilai Kepahlawanan Dalam Kehidupan Sosial	0	0	0	300.000.000	70	270.000.000	75	275.000.000	80	280.000.000	85	285.000.000
	Persentase TMP Nasional yang Terkelola Dengan Baik	82	85	87		88		89		90		91	
TOTAL KESELURUHAN					23.409.311.000		24.111.590.000		25.317.170.000		25.823.513.000		26.598.218.000

**Tabel 4.2**  
**Uraian Sub Kegiatan, kinerja, indikator, target, outcome, output dan pagu indikatif Renstra Dinas Sosial Tahun 2026 - 2030**

Bidang Urusan/ Program /outcome/ Kegiatan/ subkegiatan output	indikator outcome dan output	Baseline 2024	Target dan Pahu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>				<b>23.409.311.000</b>		<b>24.111.590.000</b>		<b>25.317.170.000</b>		<b>25.823.513.000</b>		<b>26.598.218.000</b>
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Ditingkatkan Kompetensinya</b>	78	80	1.572.564.000	85	2.480.000.000	90	2.480.000.000	95	2.480.000.000	100	2.480.000.000
<b>1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)</b>			<b>0</b>		<b>50.000.000</b>		<b>50.000.000</b>		<b>50.000.000</b>		<b>50.000.000</b>
Terlaksananya koordinasi Sumbangan dalam daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	9	10	0	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000
<b>1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksanannya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah</b>		<b>40</b>	<b>1.572.564.000</b>	<b>60</b>	<b>2.430.000.000</b>	<b>60</b>	<b>2.430.000.000</b>	<b>60</b>	<b>2.430.000.000</b>	<b>60</b>	<b>2.430.000.000</b>
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		40	30.000.000	60	30.000.000	60	30.000.000	60	30.000.000	60	30.000.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		4	422.564.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000
Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan		0	1.572.564.000	158	2.430.000.000	158	2.430.000.000	158	2.430.000.000	158	2.430.000.000
Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial		100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000

Bidang Urusan/ Program /outcome/ Kegiatan/ subkegiatan output	indikator outcome dan output		Target dan Pahu Indikatif Tahun										
			Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Ditingkatkan Kompetensinya		80	1.572.564.000	85	2.480.000.000	90	2.480.000.000	95	2.480.000.000	100	2.480.000.000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota		40	1.120.000.000	40	750.000.000	40	750.000.000	40	750.000.000	40	750.000.000	
Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui PemberdayaanEkonomi	Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah		0	-	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	
Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		0	-	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial		86	2.936.482.960	87	3.065.000.000	88	3.467.000.000	89	3.631.400.000	90	3.875.000.000	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terlaksananya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial		0	1.756.482.960	5	1.565.000.000	6	1.755.000.000	6	1.815.000.000	7	1.925.000.000	
Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		600	1.300.000.000	400	750.000.000	450	800.000.000	450	800.000.000	450	800.000.000	
Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		25	78.482.960	28	100.000.000	28	100.000.000	28	100.000.000	28	100.000.000	
Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		9	243.000.000	16	280.000.000	18	350.000.000	20	400.000.000	22	450.000.000	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		4	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	

Bidang Urusan/ Program /outcome/ Kegiatan/ subkegiatan output	Indikator outcome dan output		Target dan Pahu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
		Baselin e 2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		150	75.000.000	160	50.000.000	175	75.000.000	175	75.000.000	175	75.000.000
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		0	-	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhiya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		0	-	2	60.000.000	2	80.000.000	3	120.000.000	3	140.000.000
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		0	-	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000
Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		0	-	5	20.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhiya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		0	-	5	45.000.000	6	60.000.000	7	70.000.000	10	100.000.000
Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		4	30.000.000	8	45.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000
Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhiya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota		0	-	5	10.000.000	6	10.000.000	8	10.000.000	12	20.000.000
Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis		0	-	3	45.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000
Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota		0	-	5	20.000.000	6	25.000.000	6	25.000.000	7	30.000.000

Bidang Urusan/ Program /outcome/ Kegiatan/ subkegiatan output	indikator outcome dan output	Baseline 2024	Target dan Pahu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota		0	-	1	20.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	3	30.000.000
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial		0	-	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	25	40.000.000
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terlaksananya Sosial PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di luar panti		125	1.180.000.000	138	1.500.000.000	159	1.712.000.000	183	1.816.400.000	210	1.950.000.000
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		0	-	10	10.000.000	12	12.000.000	15	14.000.000	18	15.000.000
Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		0	-	10	20.000.000	12	24.000.000	15	26.000.000	18	30.000.000
Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		400	487.000.000	425	500.000.000	435	500.000.000	440	500.000.000	450	500.000.000
- Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		25	20.000.000	20	20.000.000	22	22.000.000	24	24.000.000	26	30.000.000
Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		0	-	10	150.000.000	12	200.000.000	13	210.000.000	15	230.000.000
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota		0	-	5	10.000.000	6	12.000.000	7	14.400.000	8	20.000.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		400	30.000.000	311	20.000.000	358	25.000.000	411	30.000.000	473	35.000.000
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota		32	20.000.000	26	25.000.000	27	30.000.000	31	35.000.000	35	40.000.000

Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota		0	-	10	10.000.000	12	12.000.000	15	14.000.000	18	20.000.000
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		30	400.000.000	35	500.000.000	40	550.000.000	46	600.000.000	50	650.000.000
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		0	-	5	20.000.000	6	22.000.000	7	24.000.000	8	30.000.000

Bidang Urusan/ Program /outcome/ Kegiatan/ subkegiatan output	indikator outcome dan output		Target dan Pahu Indikatif Tahun										
			Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		45	51.000.000	35	25.000.000	40	30.000.000	46	35.000.000	53	40.000.000	
Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		125	125.000.000	138	130.000.000	159	135.000.000	183	140.000.000	210	145.000.000	
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		15	47.000.000	20	50.000.000	25	60.000.000	30	65.000.000	35	70.000.000	
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota		0	-	25	45.000.000	30	60.000.000,0	36	65.000.000	43	70.000.000	
Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya		0	-	5	15.000.000	6	18.000.000	7	20.000.000	8	25.000.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin		60	3.749.424.000	70	2.400.000.000	80	2.470.000.000,0	90	2.530.000.000	100	2.595.000.000	
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar		0	-	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	
Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Terlaksananya Proses Pengangkatan anak untuk diusulkan ke provinsi		0	-	2	50.000.000	2	100.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin		6811	3.749.424.000	6500	2.350.000.000	6500	2.420.000.000	6500	2.480.000.000	6500	2.545.000.00000	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		12000	30.000.000	44220	50.000.000	45000	50.000.000	45000	50.000.000	45000	55.000.000	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat KewenanganKabupaten/Kota		72	250.000.000	150	300.000.000	170	350.000.000	200	400.000.000	250	450.000.000	



Bidang Urusan/ Program /outcome/ Kegiatan/ subkegiatan output	indikator outcome dan output		Target dan Pahu Indikatif Tahun										
			Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		6811	300.000.000	6500	300.000.000	6500	400.000.000	6500	400.000.000	6500	400.000.000	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		200	1.730.000.000	200	100.000.000	250	120.000.000	300	130.000.000	350	140.000.000	
Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota		7140	1.439.424.000	7150	1.500.000.000	7200	1.500.000.000	7200	1.500.000.000	7200	1.500.000.000	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana		100	737.636.000	100	760.000.000	100	755.200.000	100	795.000.000	100	785.000.000	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana		7	440.200.000	10	390.000.000	10	385.200.000	10	425.000.000	10	415.000.000	
Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		2000	200.200.000	2100	200.000.000	2100	220.200.000	2150	230.000.000	2150	250.000.000	
Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		0	-	365	50.000.000	365	50.000.000	365	50.000.000	365	50.000.000	
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		20	40.000.000	55	45.000.000	55	45.000.000	55	45.000.000	55	45.000.000	
Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		7	-	10	25.000.000	10	-	10	30.000.000	10	-	
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota		40	200.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial		0	297.436.000	150	370.000.000	150	370.000.000	150	370.000.000	150	370.000.000	

Bidang Urusan/ Program /outcome/ Kegiatan/ subkegiatan output	Indikator outcome dan output		Target dan Pahu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		7	-	7	70.000.000	7	70.000.000	7	70.000.000	7	70.000.000
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		80	123.736.000	80	100.000.000	85	100.000.000	87	100.000.000	90	100.000.000
Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana		30	173.700.000	30	150.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000
Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah		0	-	150	50.000.000	150	50.000.000	150	50.000.000	150	50.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan (TMP)		0	300.000.000	1	270.000.000	1	275.000.000	1	280.000.000	1	285.000.000
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)		0	300.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000,	1	100.000.000,	1	535.000.000
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		0	-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		1	300.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		0	-	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000

Bidang Urusan/ Program /outcome/ Kegiatan/ subkegiatan output	Indikator outcome dan output		Target dan Pahu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas layanan internal perangkat daerah		89.18	14.113.204.040	89.39	15.136.590.000	89.59	15.869.970.000	89.80	16.107.113.000	90.00	16.578.218.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan dan akuntabel		45	7.592.952.650	44	8.200.000.000	44	8.300.000.000	44	8.400.000.000	44	8.500.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		45	7.592.952.650	44	8.200.000.000	44	8.300.000.000	44	8.400.000.000	44	8.500.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya profesionalisme layanan aparatur perangkat daerah		45	464.748.750	46	390.000.000	50	400.000.000	50	404.000.000	50	410.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1	14.748.750	1	40.000.000	1	50.000.000	1	54.000.000	1	60.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		45	450.000.000	46	350.000.000	50	350.000.000	50	350.000.000	50	350.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya layanan umum perkantoran perangkat daerah		2	1.686.764.755	2	1.370.000.000	2	1.530.000.00000	2	1.560.000.000	2	1.580.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1	21.616.140	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		13	111.464.980	46	80.000.000	50	100.000.000	54	100.000.000	58	100.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		5	61.908.000	4	60.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		12	679.732.660	17	900.000.000	20	570.000.000	22	600.000.000	25	620.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		3	52.042.975	10	80.000.000	15	100.000.000	20	100.000.000	25	100.000.000

Bidang Urusan/ Program /outcome/ Kegiatan/ subkegiatan output	indikator outcome dan output	Baseline 2024	Target dan Pahu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		2	360.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2	400.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah		0	745.276.000	1	1.250.000.000	1	1.300.000.000	1	1.300.000.000	1	1.300.000.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		5	745.276.000	5	800.000.000	5	850.000.000	5	850.000.000	5	850.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0	-	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya layanan jasa operasional umum perangkat daerah		2	3.032.998.635	12	3.226.590.000	12	3.389.970.000	12	3.473.113.000	12	3.768.218.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		5	292.752.235	2	349.500.000	2	359.970.000	2	393.513.000	2	438.218.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		2	2.740.246.400	12	2.877.090.000	12	3.030.000.000	12	3.079.600.000	12	3.330.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar berfungsi dengan optimal		200	590.463.250	20	700.000.000	40	950.000.000	40	970.000.000	40	1.020.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0	0	20	150.000.000	22	200.000.000	24	210.000.000	26	220.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0	-	20	300.000.000	20	350.000.000	20	400.000.000	20	450.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		200	163.783.000	20	100.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		2	130.000.000	3	200.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000

4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

Program – program prioritas Kota Balikpapan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2025 – 2029 perlu dukungan dari Perangkat Daerah terkait aplikasinya. Salah satu program unggulan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan adalah Program Perlindungan Sosial Masyarakat Rentan. Dalam Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan, Program ini telah menjadi program prioritas yaitu pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rentan Miskin. Kegiatan ini berupa pemberian bantuan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan miskin di Kota Balikpapan. Pada tahun 2026, target yang telah ditetapkan adalah sebanyak 7.140 orang calon penerima.

4.3 Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah indikator utama yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama ini juga merupakan sasaran strategis yang ditetapkan dan menjadi target utama yang harus dicapai. Dinas Sosial Kota Balikpapan telah menyusun dan menetapkan IKU dalam kurun waktu 2026 – 2030 yaitu sebagaimana tabel di bawah ini:

NSPK & Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2026	2027	2028	2029	2030
1	2		3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kondusifitas dan Perlindungan Sosial	Meningkatnya Pemberdayaan PPKS		Persentase Graduasi KPM	3.4	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
		Meningkatnya kualitas layanan kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang terlayani	84	86	87	88	89	90
		Meningkatnya persentase penerapan	Persentase Penerapan Nilai Kepahlawan	0	0	70	75	80	85

		nilai kepahlawanan dalam kehidupan sosial	an dalam Kehidupan Sosial						
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	69.60	68.61	69.21	69.80	70.40	71.00

**TABEL 4.4**  
**INDIKATOR KINERJA KUNCI DINAS SOSIAL**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>STATUS</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
1	Persentase Graduasi KPM	POSITIF	Persen	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	POSITIF	Nilai	69,60	68,01	70	70,50	71	71,50	72
3	Persentase PSKS yang Terlayani	POSITIF	Persen	84	85	86	87	88	89	90
4	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	POSITIF	Persen	40	50	60	70	80	90	100
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	POSITIF	Nilai	87,07	88,18	89,18	89,39	89,59	89,80	90
6	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Ditingkatkan Kompetensinya	POSITIF	Persen	78	79	80	85	90	95	100
7	Persentase Korban	POSITIF	Persen	100	100	100	100	100	100	100

	Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana									
8	Persentase TMP Nasional yang Terkelola Dengan Baik	POSITIF	Persen	82	85	87	88	89	90	91



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2026 – 2029 disusun sebagai pedoman arah pembangunan bidang sosial dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) Kota Balikpapan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025 tanggal 20 Agustus 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029. Dengan demikian, dokumen ini memiliki peran strategis dalam mewujudkan keterpaduan, konsistensi, dan kesinambungan pembangunan sosial, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan, perlindungan, dan pemberdayaan sosial bagi masyarakat Kota Balikpapan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada komitmen, konsistensi, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat secara luas. Oleh karena itu, koordinasi, kolaborasi, serta partisipasi aktif dari seluruh stakeholder terkait merupakan kunci utama dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kami berharap semoga seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan Kota Balikpapan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, dan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan amanah pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Balikpapan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

---

#### 1.1. Latar Belakang

Keberhasilan penyelenggaraan program-program pembangunan Daerah tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Daerah yang telah dilakukan dan ditetapkan sebelumnya. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/Daerah dalam jangka waktu tertentu. Salah satunya adalah RPJMD.

Pembangunan pada hakikatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Di dalam setiap wacana, paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Perubahan dan perkembangan zaman yang begitu cepat menuntut stakeholder untuk dapat merespon dengan program dan aksi yang inovatif dan solutif. Era globalisasi, kemajuan teknologi, revolusi industri 4.0 yang mempengaruhi perubahan komunikasi dan persebaran informasi serta digitalisasi ekonomi memberikan tantangan bagi Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dalam menyiapkan strategi terbaik untuk menghadapi perubahan tersebut. Perubahan profesi menjadi peranan dan profesi-profesi baru pada era post industrial yang di masa depan sudah dapat dipastikan terdapat perubahan signifikan bagaimana industri berkembang dan mengubah karakteristik ketenagakerjaan.

Pada tahun 2020 telah disahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian diganti dengan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perppu ini berusaha untuk memanfaatkan potensi bonus demografi yang ada dan melakukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi atas banyaknya aturan dan regulasi (hyper-regulation), yang dapat menghambat pencapaian tujuan untuk penciptaan kesempatan kerja. Undang-Undang ini juga mendorong peningkatan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja baru dengan memberikan kemudahan bagi UMKM dan Koperasi. Selain itu meningkatkan perlindungan bagi pekerja atau buruh. Dengan hadirnya peraturan ini akan mempengaruhi strategi dan arah kebijakan dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah pengampu urusan ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan, urgensi perencanaan strategis menjadi penting untuk menjawab tantangan dan isu-isu terkait pembangunan ketenagakerjaan di Kota Balikpapan. Lebih lanjut, penyusunan Renstra Dinas ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (Good Governance) di Indonesia. Sehingga penyusunan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan ini tidak lepas dari Renstra K/L dan menjadi pedoman bagi penyusunan renstra di Kabupaten/Kota. Dengan demikian antara pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota mempunyai program yang saling bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen RENSTRA memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam menyusun Renstra Dinas Ketenagakerjaan terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan yang berlandaskan pada RPJMD Kota Balikpapan berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota, Pemerintah Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Adapun visi Pembangunan Kota Balikpapan 5 (lima) tahun ke depan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, adalah:

*“Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua*

*Dalam Bingkai Madinatul Iman”.*

Sedangkan misi pembangunan Kota Balikpapan terdapat lima misi, yaitu :

1. Membangun dan Mengembangkan Pemerintah yang Bersih dan Profesional Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat;
2. Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Terpadu yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Masyarakat Balikpapan;
3. Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan Terdidik;
4. Mengembangkan perekonomian yang tumbuh berkeadilan untuk semua;
5. Konsisten Menjaga Lingkungan Hidup yang Sehat dan Nyaman Untuk Semua.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
22. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
28. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020- 2024
29. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
34. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 6 E);
35. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013 Nomor 14);
36. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2045;
37. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan ini adalah Menjabarkan kebijakan umum dan program pembangunan daerah yang telah disepakati dalam RPJMD Kota Balikpapan periode 2025-2029, dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan ini adalah sebagai berikut:

- Menjabarkan strategi yang akan menjadi dasar pilihan program aksi Dinas untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di bidang ketenagakerjaan, yang telah menjadi komitmen bersama pada dokumen RPJMD 2025-2029 Kota Balikpapan.
- Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang ketenagakerjaan Kota Balikpapan.
- Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan akan terdiri dari 7 (tujuh) bab dengan pokok bahasan serta susunan garis besar setiap bab adalah sebagai berikut:

- BAB 1. PENDAHULUAN  
Menguraikan dan membahas tentang: latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
- BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD  
Menguraikan dan membahas tentang: Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.  
Menguraikan dan membahas tentang: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
Menguraikan dan membahas tentang: Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, serta Strategi dan Kebijakan SKPD  
Menguraikan dan membahas tentang: rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
- BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  
Menguraikan dan membahas tentang: rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif  
Menguraikan dan membahas tentang: indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
- BAB 5 PENUTUP

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD

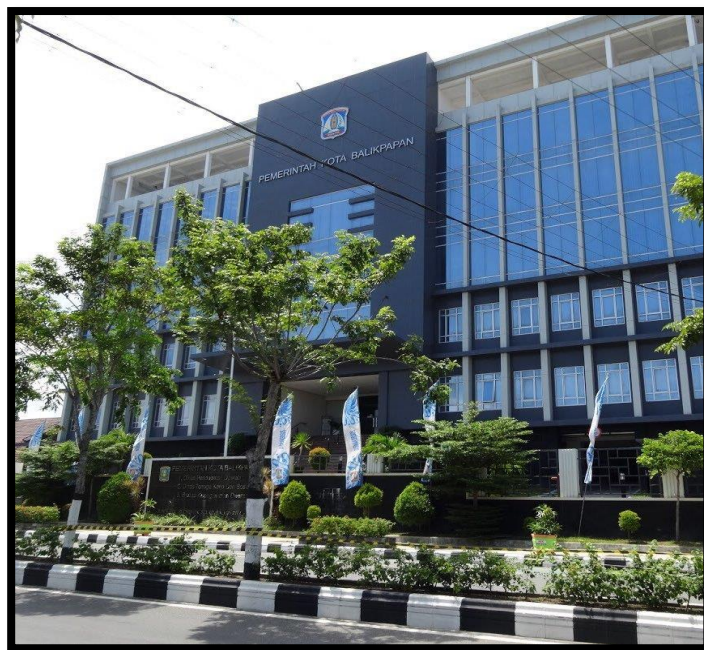
---

## **2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat daerah**

### **2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD**

Dinas Ketenagakerjaan merupakan Dinas yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah serta tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan bertempat di Gedung Gadis Jl. Jenderal Sudirman No. 02 RT. 10 kelurahan Kelandasan Ulu kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Kalimantan Timur 76112.

Gambar 2.1  
Dinas Ketenagakerjaan  
Kota Balikpapan



*Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan terdiri atas :

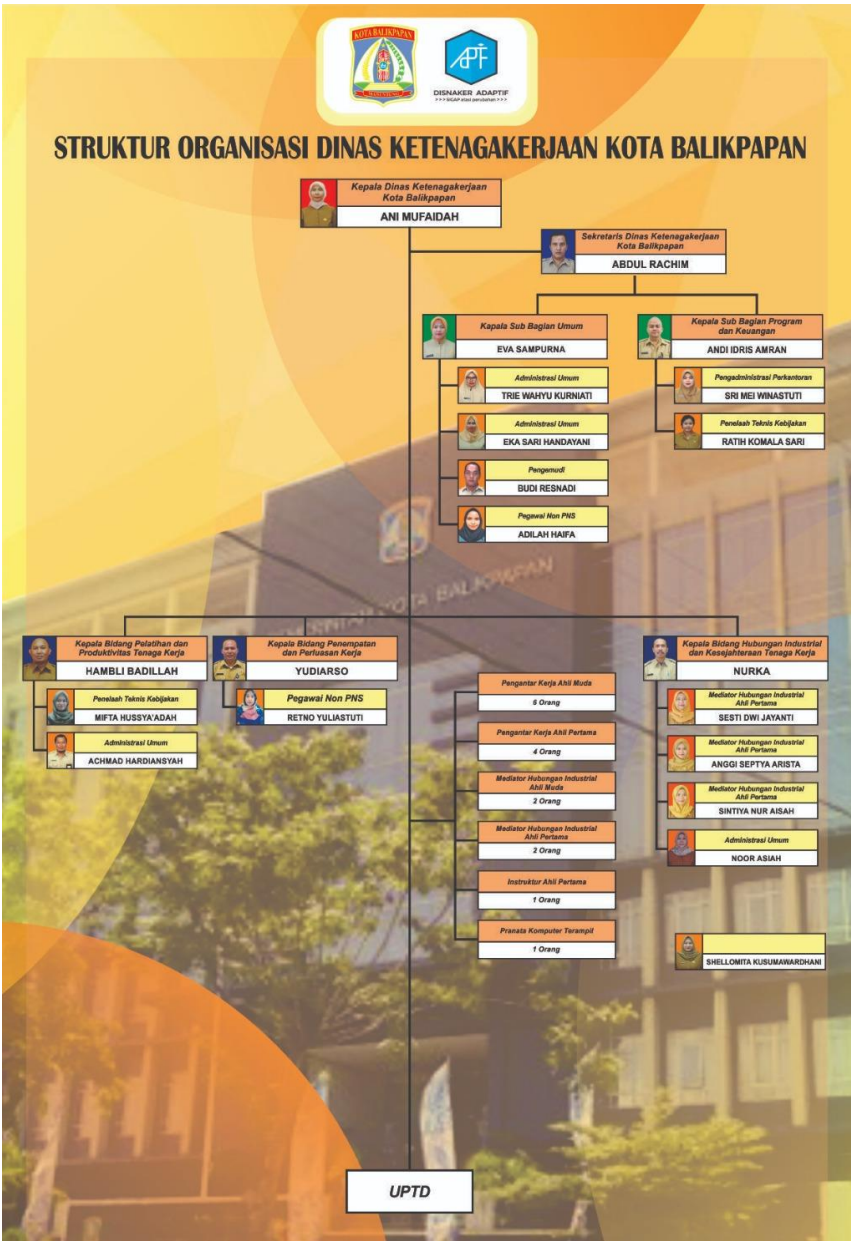
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
  - (1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
  - (2) Sub Bagian Umum
- c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahi :
  - (1) Pelatihan dan Pemagangan
  - (2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja
  - (3) Produktivitas Tenaga kerja.
- d. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, membawahi :
  - (1) Penempatan Tenaga Kerja
  - (2) Perluasan Kerja



- (3) Analisis Pasar Kerja dan Data Ketenagakerjaan
- e. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, membawahi :
  - (1) Pembinaan Kelembagaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Persyaratan Kerja
  - (2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.2  
Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan  
Kota Balikpapan



Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan

Berdasarkan pasal 4, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Balikpapan, mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas, maka Dinas Ketenagakerjaan menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:

- a. Penetapan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan;
- b. Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan;
- c. Penyelenggaraan Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- d. Penyelenggaraan Dan Penempatan Tenaga Kerja;
- e. Penetapan Kebijakan Program Dan Pengembangan Perluasan Kerja;
- f. Penyelenggaraan Hubungan Industrial Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja;
- g. Penyelenggaraan Dan Pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketenagakerjaan;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan/atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tugas dan Fungsi tersebut diatas dijabarkan menjadi tugas Sekretariat dan Bidang-Bidang dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengordinasian, penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protocol, hubungan masyarakat, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan.
2. Bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja
3. Bidang Penempatan Dan Perluasan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang penempatan dan perluasan kerja;
4. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pembinaan di bidang hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja.

### **2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Dalam menyelenggarakan pelayanannya, Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan didukung sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) Pegawai Negeri Sipil

dan 5 (Lima) pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan Eselon, pangkat/golongan, dan Pendidikan Pegawai PNS dan Non PNS di lingkup Dinas Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Daftar Pegawai Dinas Ketenagakerjaan

No	Eselon	Pangkat/Gol	Pendidikan								Total	Keterangan
			SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2		
1	IIB	Pembina Utama Muda / 4C								1	1	PNS
2	IIIB	Pembina / 4A							1	2	3	PNS
3	IIIB	Penata Tk.1 / 3D							1		1	PNS
4	IVA	Penata Tk.1 / 3D							1		1	PNS
5		Penata Tk.1 / 3D							8		8	PNS
6	IVA	Penata / 3C							1		1	PNS
7		Penata Muda Tk.1 / 3B			2				4		6	PNS
8		Penata Muda / 3A							7		7	PNS
9		Pengatur Tk.1 / 2D							4		4	PNS
10		Staff							4		4	PNS
11		Staff							2		2	NON PNS
Total											38	

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan

2.1.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Inti dari pelayanan Dinas Ketenagakerjaan adalah :

- 1. Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 2. Penempatan dan Perluasan Kerja;
- 3. Rencana Tenaga Kerja;
- 4. Pembinaan Hubungan Industrial.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan misi Kepala Daerah Terpilih.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja **sasaran** strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut.:

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan  
Kota Balikpapan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)				62,9	63,8	64,7	65,6	66,5	64,3	65,6	53,5	66,8	102,21	102,79	82,658	101,83
2.	Nilai SAKIP OPD				62	63	65	68	72	61,5	62,3	63,8	65,19	99,2	98,9	98,2	95,9

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan

Tabel 2.3  
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan  
Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.230.320.328	7.079.207.500	7.358.330.537	9.637.618.009	9.293.441.511	5.791.223.939	6.446.784.050	7.444.262.286	8.538.307.903	-	93	91	101	89	-	101	85
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		15.000.000	-	-	-	-	5.974.214		-	-		40	106			-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.579.550.000	5.591.537.000	5.447.853.125	7.175.244.909	6.936.081.816	4.421.352.703	5.239.700.321	5.754.639.112	6.669.007.425		97	94	90	93	-	84	60
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	264.150.000	-	320.924.262	366.743.000	485.792.000	221.629.960		287.892.720	315.931.000		84		90	86	-	73	37
Administrasi Umum Perangkat Daerah	903.905.076	777.050.800	824.974.000	1.117.037.400	894.600.101	788.609.418	613.265.516	714.409.529	891.347.649		87	79	87	80	-	99	80
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	199.170.000	223.317.000	340.573.400	301.456.094	-	178.661.000	283.608.213	293.471.312			90	127	86	-	88	87
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.107.752	181.449.700	222.872.650	249.105.500	247.375.500	127.104.114	158.123.828	146.636.755	148.241.756		68	87	66	60	-	96	80

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294.607.500	315.000.000	318.389.500	388.913.800	428.136.000	232.527.744	251.059.171	257.075.957	220.308.761		79	80	81	57	-	99	74
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	958.616.500	999.871.500	1.094.000.000	1.347.567.000	1.389.731.491	828.424.083	876.213.529	1.516.089.205	1.276.262.394	-	86	88	139	95	-	100	91
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	908.835.000	949.973.000	990.000.000	1.287.807.000	1.257.618.077	780.424.083	834.422.799	1.420.014.205	1.218.658.494		86	88	143	95	-	100	91
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	49.781.500	49.898.500	52.000.000	-	66.056.707	48.000.000	41.790.730	46.716.000	-		96	84	90		-	69	99
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	-	-	52.000.000	59.760.000	66.056.707	-	-	49.359.000	57.603.900				95	96	-	115	58
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-	399.952.800	115.000.000	133.186.000	222.621.025	-	257.703.208	114.014.788	126.575.650	-		64	99	95	-	78	52
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	399.952.800	115.000.000	133.186.000	222.621.025	-	257.703.208	114.014.788	126.575.650			64	99	95	-	78	52
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	195.933.000	454.969.700	500.731.000	464.437.900	632.670.451	129.075.500	291.993.344	295.832.737	363.250.870	-	66	64	59	78	-	143	113
Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	97.988.000	264.974.700	312.585.000	247.497.800	281.026.673	75.090.500	194.987.184	147.594.238	209.731.426		77	74	47	85	-	122	119
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	97.945.000	139.995.000	146.146.000	174.880.100	301.643.778	53.985.000	97.006.160	123.242.120	122.953.603		55	69	84	70	-	97	102

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	Anggaran	Realisasi
Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota	-	50.000.000	42.000.000	42.060.000	50.000.000	-	-	24.996.379	30.565.841			-	60	73	-	76	61
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	226.209.200	514.995.620	537.608.500	466.476.500	2.682.935.522	164.614.955	361.770.472	379.459.910	395.260.937	-	73	70	71	85	-	200	107
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.000.000	40.000.000	41.756.000	-	-	14.338.000	18.421.000		-		68	46	-	#VALUE!	#DIV/0!	98	64
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	205.209.200	474.995.620	495.852.500	466.476.500	2.682.935.522	150.276.955	343.349.472	379.459.910	395.260.937		73	72	77	85	-	202	111
Total	7.611.079.028	9.448.997.120	9.605.670.037	12.049.285.409	14.221.400.000	6.913.338.477	8.234.464.603	9.749.658.926	10.699.657.754		91	87	101	89		115	76

Berdasarkan Tabel 2.2 mengenai pencapaian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan periode 2021 – 2025, dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan pada tahun 2021 – 2024 cukup baik, Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 97.8%, sedangkan untuk untuk nilai AKIP Dinas Ketenagakerjaan nya sebesar 98.05%. Tingginya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dipengaruhi oleh Letak strategisnya Kota Balikpapan sebagai Kota penyangga IKN sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan jumlah lowongan kerja dan nilai Penempatan Tenaga Kerja (Peluang Kerja meningkat).

Berdasarkan Tabel 2.3 mengenai Anggaran dan Realisasi Pendanaan dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan mengalami penurunan pada setiap tahunnya mulai dari Tahun 2021 Rasio anggaran yang terserap sebesar 91% sedangkan pada tahun 2024 rasio anggaran yang terserap sebesar 89 %

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan periode 2021-2026 semakin besar terlebih dengan diberlakukannya era pasar bebas ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan komitmen yang dibangun oleh 10 negara ASEAN untuk mewujudkan masyarakat ASEAN yang lebih kuat dan sejahtera di era Globalisasi. Masyarakat ASEAN yang sejahtera ini dibangun di atas 3 pilar yaitu: Politik dan Keamanan (*Asean Security Community*), *Asean Economic Community* dan *Asean Socio Culture Community*. MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional yang secara langsung akan mempengaruhi kualitas ketenagakerjaan di Indonesia umumnya dan Balikpapan khususnya.

Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Kota Balikpapan ditinjau dari aspek ketenagakerjaan :

- a. Dilihat dari sisi penguasaan teknologi tinggi masih perlunya pendampingan dari tenaga kerja asing;
- b. Kemampuan berkomunikasi, dalam hal ini diperlukan peningkatan keterampilan penguasaan bahasa asing, terutama Bahasa Inggris sebagai sarana komunikasi global

Peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan masyarakat Kota Balikpapan antara lain :

- a. Kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena masih tersedia lapangan kerja dengan berbagai jenis jabatan keahlian yang dibutuhkan.
- b. Akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bias jadi tanpa ada hambatan tertentu.
- c. Para wirausahawan juga mendapat kesempatan yang bagus untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

Di sisi yang lain, perkembangan daya saing perekonomian nasional juga cenderung menurun, akibat biaya ekonomi yang tinggi. Berdasarkan kondisi tersebut, maka optimalisasi pembangunan sector ketenagakerjaan adalah pilihan yang strategis. Beberapa hal pokok yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :



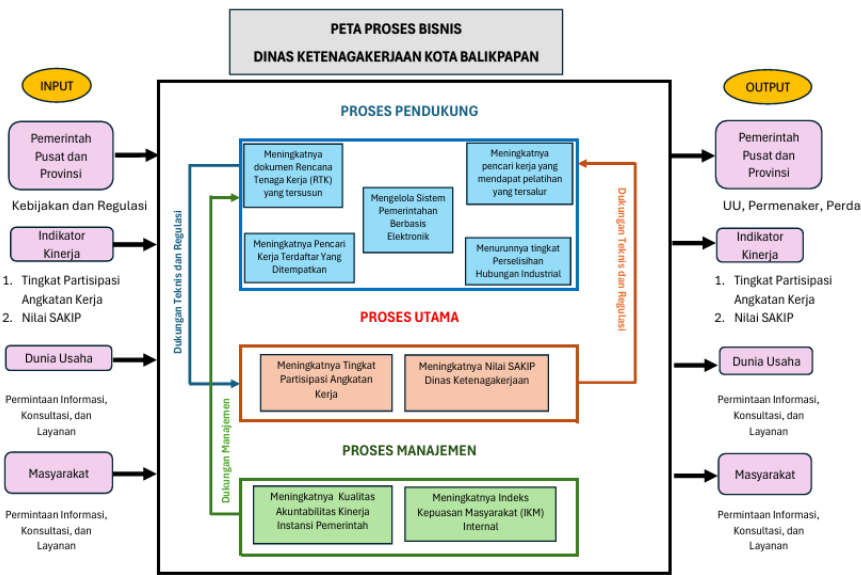
- a. Bentuk program, Kegiatan, dan Sub kegiatan harus dipastikan lebih sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- b. Rencana yang baik harus dilaksanakan, dikendalikan, dan dievaluasi secara berkesinambungan. Oleh karena itu, kualitas rencana harus selalu ditingkatkan.
- c. Koordinasi dan sinkronisasi antar organisasi perangkat daerah kota Balikpapan, maupun Instansi vertical juga harus ditingkatkan agar upaya pencapaian Visi Kota 2022 – 2026 lebih berhasil dan berdaya guna.

Penyusunan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan merupakan perencanaan yang disusun berdasarkan kondisi lingkungan dan perubahan yang terjadi melalui suatu analisis terhadap lingkungan, baik internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan karakteristik Dinas Ketenagakerjaan. Sebagaimana diketahui bahwa untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang meliputi lingkungan internal dan eksternal. Kondisi lingkungan tersebut akan memberikan kekuatan dan kelemahan bagi organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi jalannya organisasi dalam bentuk peluang dan ancaman. Apabila kondisi lingkungan tersebut tidak bisa dikenali dan diidentifikasi secara baik oleh organisasi, maka akan berakibat fatal terhadap kelangsungan organisasi tersebut. Oleh karena pengaruh dan akibat yang ditimbulkan begitu besar, maka menjadi penting bagi pimpinan organisasi dan segenap jajarannya untuk secara intens memantau dan mengikuti perubahan di lingkungan yang terjadi.

### 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Peta proses bisnis Dinas Ketenagakerjaan (atau sering disebut probis) adalah diagram yang menunjukkan hubungan kerja Dinas Ketenagakerjaan dengan unit organisasi untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan organisasi, menghasilkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta ini tidak hanya mencakup alur kerja internal, tetapi juga interaksi dengan pihak eksternal. Berikut Peta Proses Bisnis Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan :

Gambar 3



Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan

Hal ini perlu diupayakan agar organisasi mampu menjawab setiap perubahan yang menjadi ancaman/tantangan organisasi. Dengan demikian, organisasi dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan akan tetap eksis dan mampu mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ketenagakerjaan secara optimal di Kota Balikpapan. Analisis lingkungan yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan metode “Analisis SWOT ” (*Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats*). Analisis SWOT ini secara efektif sangat membantu Dinas dengan melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal. Adapun empat unsur *strenghts, weakness, oppurtunities, threats* yang terangkum dalam lingkungan internal dan eksternal Dinas Tenaga Kerja Kota Balikpapan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

## 1. Lingkungan Internal

### a. Kekuatan (*Strenghts*)

- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
- Tersedianya dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
- Tersedianya Dukungan Anggaran dari dana APBD;
- Tersedianya SDM yang memadai dan SOP layanan;
- Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai;
- Tersedianya Peraturan Perundang-undangan bidang ketenagakerjaan;
- Adanya komunikasi dan interaksi yang baik antara atasan dan bawahan secara sinergi;
- Tersedianya data yang menunjang kegiatan;

### b. Kelemahan (*Weakness*)

- Masih adanya kesenjangan antara penguasaan ilmu pengetahuan dengan teknologi yang berkembang
- Kurang profesional dan optimal penguasaan personil organisasi;
- Masih belum kuatnya komitmen personil terhadap Dinas;
- Kurang tertibnya pengelolaan administrasi anggaran;
- Kurang optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana;
- Belum optimalnya dukungan dana dengan sarana dan prasarana yang memadai;
- Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi;
- Masih kurangnya tenaga teknis dan fungsional (proses regenerasi belum berjalan dengan baik);
- Masih belum optimalnya sistem komunikasi dan koordinasi hubungan internal antar personal, Seksi dan Bidang;

## 2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan Eksternal merupakan faktor-faktor di luar Organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan organisasi yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, keamanan dan teknologi. Faktor eksternal inilah yang akan memberikan “peluang” (*opportunities*) tapi juga memunculkan “tantangan” (*threats*). Adapun faktor eksternal Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dapat diidentifikasi sebagai berikut:

### a. Peluang (*Opportunities*)

- Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Kota Balikpapan dan DPRD;
- Pemberdayaan sumber daya manusia yang banyak (Penduduk, Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja);
- Adanya dukungan lintas sektoral, LSM serta peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program;
- Makin dinamisnya perkembangan pelayanan publik (antar kerja) oleh swasta;
- Kebijakan pusat dan daerah saling mendukung dan menunjang;
- Forum-forum koordinasi, *Workshop* dan mediasi yang menjembatani dengan baik, antara Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dengan pelaku, masyarakat, pekerja dan serikat buruh;

b. Ancaman ( *Threats* )

- Tingginya angka pengangguran;
- Krisis Global;
- Kesempatan kerja yang tersedia sangat terbatas;
- Masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- Masih rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja;
- Kurangnya koordinasi antar lembaga;
- Makin kritisnya masyarakat dan tingginya tuntutan terhadap pelayanan.

## 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang pembangunan yang sangat luas cakupannya. Ketenagakerjaan mencakup segala aspek yang mempunyai korelasi dengan tenaga kerja dalam rangka keterlibatannya dalam proses produksi barang atau jasa. Pembangunan ketenagakerjaan menjadi salah satu faktor dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi bagian dari pembangunan nasional yang memiliki peran sangat penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas, khususnya pada aspek *human capital* dalam pembangunan baik daerah maupun nasional.

Masalah yang sedang dihadapi Pemerintah Kota Balikpapan dalam bidang ketenagakerjaan adalah tingginya penganggur terbuka yang akan berpengaruh langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial politik. Seandainya masalah pengangguran ini berlanjut dan terus meningkat tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh terhadap proses pembangunan

Apabila dilihat dari karakteristiknya, penganggur di Kota Balikpapan memiliki karakteristik yang unik. Dimana angka pengangguran terdidik yang cukup tinggi. Yang dimaksud pengangguran terdidik sendiri adalah mereka yang mempunyai kualifikasi lulusan pendidikan yang cukup namun masih belum memiliki pekerjaan.

Jumlah pencari kerja terdaftar di Kota Balikpapan pada akhir tahun 2024 yang belum ditempatkan ada sebanyak 3.249 orang. Bila dirinci

berdasarkan jenis kelamin, 1.781 orang tercatat berjenis kelamin laki-laki dan 1.468 orang yang berjenis kelamin perempuan. Jumlah ini turun dari tahun 2023, dimana jumlah pencari kerja yang terdaftar tercatat sebanyak 4.445 orang, yang terdiri dari 3.035 orang laki-laki dan 1.410 orang perempuan.

Tabel 2.4.  
Data Penempatan di Kota Balikpapan  
Tahun 2021 - 2024

Tingkat Pendidikan	TAHUN			
	2023		2024	
	L	P	L	P
<SD	1	0	0	2
SMTP	4	0	5	1
SMTA/Kejuruan	874	305	733	406
DIPLOMA I/II/III	141	51	45	21
S1	188	121	183	176
S2	0	2	1	0
JUMLAH	1687		1573	

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) dan TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) adalah dua indikator penting dalam pasar tenaga kerja di Balikpapan. TPT menunjukkan persentase pengangguran terhadap angkatan kerja, sedangkan TPAK menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif bekerja atau mencari kerja.

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kota Balikpapan. Jumlah penduduk usia kerja di Kota Balikpapan pada Agustus 2024 sebanyak 549.120 orang, naik sebanyak 8.166 orang dibanding Agustus 2023 dan naik sebanyak 46.581 orang dibanding Agustus 2022. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan kelompok angkatan kerja dengan jumlah sebanyak 366.791 orang, sisanya tergolong pada kategori bukan angkatan kerja.

Komposisi angkatan kerja di Kota Balikpapan pada Agustus 2024 terdiri atas 343.968 orang yang bekerja dan 22.823 orang pengangguran. Apabila dibandingkan dengan Agustus 2023, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja di Kota Balikpapan sebanyak 23.407 orang dengan komposisi penduduk bekerja naik sebanyak 21.499 orang dan pengangguran naik sebanyak 1.908 orang.

Tabel 2.5  
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama di

Kota Balikpapan,2022-2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024	Perubahan Ags 2022-Ags 2023		Perubahan Ags 2023-Ags 2024	
	orang	orang	orang	orang	persen	orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja	502.539	540.954	549.120	38.415	7,64	8.166	1,51
Angkatan Kerja	329.542	343.384	366.791	13.842	4,20	23.407	6,82
• Bekerja	306.793	322.469	343.968	15.676	5,11	21.499	6,67
• Pengangguran Terbuka	22.749	20.915	22.823	-1.834	-8,06	1.908	9,12
Bukan Angkatan Kerja	172.997	197.570	182.329	24.573	14,20	-15.241	-7,71
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65,58	63,48	66,80	-2,10		3,32	
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,90	6,09	6,22	-0,81		0,13	

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan

Tabel 2.6  
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Balikpapan  
Tahun 2021 – 2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Balikpapan	9,00	8,94	6,90	6,09	6,22
Provinsi Kaltim	6,87	6,83	5,71	5,31	5,14
Nasional	4,99	6,49	5,86	5,32	4,91

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan

Hubungan industrial di Balikpapan, seperti halnya di daerah lain, mengacu pada sistem hubungan antara pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah dalam proses produksi barang dan/atau jasa. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Balikpapan berperan dalam memfasilitasi dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, serta memberikan sosialisasi terkait ketenagakerjaan. Berikut data Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi di Kota Balikpapan Tahun 2020-2024:

Tabel 2.7  
Banyaknya Perselisihan Hubungan Kerja yang Terjadi di Kota Balikpapan  
Tahun 2021-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persoalan Yang masuk	72	50	40	38	51
Diselesaikan PB	50	34	10	23	28
Diteruskan ke PHI	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.8

Identifikasi Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
Angka Pengangguran Tinggi	Masih Rendahnya Angka Partisipasi Angkatan Kerja	1. Penempatan tenaga kerja terdidik pada sector formal belum optimal 2. Link and Match pencaker dengan pasar kerja masih rendah 3. Pasar kerja yg tersedia memerlukan komtenesi teknis yg belum dimiliki pencaker yg tersedia 4. Perluasan Pasar Kerja Belum Optimal
	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pelatihan Kerja terhadap Calon Tenaga Kerja	1. Fasilitas dan sarana Pelatihan di Balikpapan/Kalim sesuai kebutuhan pasar kerja masih terbatas 2. Uji kompetensi masih terbatas dan mahal 3. Belum ada peta perencanaan kebutuhan TK secara Makro
	Belum Optimalnya Program Magang dan pembinaan kewirausahaan untuk Calon Tenaga Kerja	Partsipasi perusahaan dalam pelaksnnan magang mandiri belum optimal
Hubungan Industrial dan Perlindungan Pekerja belum Optimal	Angka Perselisihan Hubungan Industrial masih tinggi	1. Pemahaman terkait dengan Syarat Kerja Belum Sepenuhnya Dipahami Baik Oleh Pekerja Maupun Perusahaan masketenagakerjaan masih kurang 2. Masih banyak pekerja yang tidak memahami aturan ketenagakerjaan 3. Tenaga teknis fungsional (Mediator) masih sangat kurang 4. Regulasi sangsi pelanggaran 5. pelanggaran ketenagakerjaan masih banyak yang belum tegas
Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah

	Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial Masih Belum Optimal	1. Tatakelola Layanan Publik Bidang Ketenagakerjaan Belum optimal 2. Tidak adanya PNS khusus Mediator/ SDM Mediator sangat kurang
	Pemenuhan Hak perlindungan Jaminan Sosial Belum Optimal	1. Masih ada pemebri kerja pada seektor tertentu tidak taat ketentuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 2. Pemahaman Pekerja terhadap Hak belum optimal

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan

Akar permasalahan belum optimalnya penempatan/ penyerapan tenaga kerja lokal adalah adanya kesenjangan kompetensi pencari kerja dengan kompetensi yang dipersyaratkan pasar kerja, selain itu perluasan kesempatan kerja juga belum optimal. Partisipasi perusahaan dalam penyediaan informasi pasar kerja, sebagai upaya perluasan kesempatan kerja juga belum optimal. Perusahaan yang tergabung di dalam aplikasi loker Disnaker jumlahnya masih sangat kecil. Kesenjangan kompetensi disebabkan masih terbatasnya saran prsarana pelatihan kerja baik yang ada di BLK maupun LPK Swasta. Masih terbatasnya pelaksana uji kompetensi di daerah bagi tenaga kerja/angkatan kerja, karna pelaksana uji kompetensi masih mendatangkan dari pulau jawa sehingga cost pelaksanaan uji kompetensi masih mahal.

Perubahan paradigma pelayanan dalam era digital, membuat Disnaker berinovasi dgn meningkatkan pelayanan dari *offline* menjadi *online*, khusus untuk pelayanan registrasi dan pengisian data profil pencaker, sementara untuk wawancara, pengambilan foto diri dan cetak kartu masih bersifat *offline*. Namun dengan inovasi tersebut, belum dapat dimanfaatkan secara penuh oleh pencaker, hal tersebut dikarenakan hal-hal sbb:

- a) Keterbatasan PC/Laptop yang dimiliki pencaker
- b) Kurangnya penguasaan alat elektronik
- c) Adanya pencaker yang kurang aktif di media social.

Untuk meningkatkan parsipasi angkatan kerja melalui peningkatan angka penempatan tenaga kerja akan dapat dilakukan melalui peningkatan kinerja pengantar kerja, meningkatkan kompetensi pencari kerja dan memperluas informasi pasar kerja dalam rangka perluasan kesempatan kerja, merumuskan strategi dan arah kebijakan ketenagakerjaan yang tepat, menyusun perangkat peraturan ketenagakerjaan yang memadai dan lain-lain.

Perluasan pasar kerja dalam rangka mengurangi pengangguran pada umumnya dan pengangguran terdidik pada khususnya selain melalui penempatan kerja disektor formal juga dapat dilakukan dengan pelatihan kewirausahaan untuk menumbuhkan enterpreneurship atau kewirausahaan sebagai langkah untuk pemberdayaan angkatan kerja, sehingga tercipta lapangan kerja bagi diri sendiri dan orang lain. Program perluasan pasar kerja ini harus dilakukan oleh lintas sector dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pembinaan kewirausahaan dan

usaha kecil/ mikro serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ekonomi kreatif.

Adapun program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dalam peningkatan angka partisipasi angkatan kerja dalam mengatasi masalah pengangguran ini antara lain Program Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Pembinaan Pelatihan Berbasis Kompetensi, Program Pemagangan serta Program Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja.

Peningkatan kompetensi tenaga kerja akan dilakukan melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi, program pemagangan baik melalui lembaga pelatihan swasta maupun pemerintah. Masih belum optimalnya kontribusi BLK milik Pemerintah Pusat maupun Provinsi, pada dasarnya menjadi lahan potensial bagi tumbuh dan berkembangnya Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta, terlebih lagi jika dikaitkan Rencana Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Program pelatihan ketrampilan/kejuruan yang potensial dipasar kerja antara lain : otomotif, alat berat , Uji tanpa Rusak, *Rigging*, *Scaffolding*.

Pemahaman dan pelaksanaan Hubungan Industrial yang baik dan dinamis dalam rangka mensejahterakan tenaga kerja di perusahaan masih belum sepenuhnya dilaksanakan baik oleh pengusaha maupun tenaga kerja sehingga masih sering kita jumpai adanya masalah-masalah perselisihan ketenagakerjaan di Perusahaan yang berakibat fatal yaitu terjadinya mogok kerja ataupun pemutusan hubungan kerja. Sengketa antara perusahaan – pekerja disebabkan belum pahamnya perusahaan dan pekerja dalam memahami butir – butir kesepakatan perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja. Sengketa antara perusahaan – pekerja dapat diminimalisir apabila kedua pihak memahami hak dan kewajiban sebagai pengusaha maupun pekerja.

Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja pada dasarnya adalah dua hal yang kondisi yang saling silang sebagai sebab - akibat. Pada periode tahun 2020 dan 2021, perselisihan terjadi lebih banyak sebagai akibat dari adanya Pemutusan Hubungan Kerja sebagai dampak akibat Pandemi Covid-19.

Sehubungan dengan itu perlu adanya pembinaan-pembinaan rutin dan berkelanjutan baik terhadap tenaga kerja/ Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan pengusaha serta peningkatan kinerja pegawai Mediator Hubungan Industrial. Dalam penanganan perselisihan kasus –kasus tertentu perlu adanya dukungan serta koordinasi yang baik dari Pengawas tenaga kerja Provinsi. Adapun Program yang akan dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan terkait permasalahan hubungan Industrial ini Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial baik kepada pengusaha maupun kepada pekerja melalui serikat pekerja. Untuk mengatasi tidak adanya tenaga Mediator , maka akan diupayakan pemenuhan secara bertahap dengan mengajukan usulan diklat dan uji kompetensi serta usulan fomasi CPNS-Mediator. Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Visi pembangunan daerah Kota Balikpapan untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

*“Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua dalam  
Bingkai Madinatul Iman”*



Visi tersebut mencerminkan Kota Balikpapan sebagai kota maju berperadaban tinggi yang nyaman dihuni dengan spriritualitas yang mewarnai seluruh aktifitas penduduk kota. Dalam kallimat visi tersebut terdapat tiga kata kunci yaitu kota global, nyaman untuk semua, dan madinatul iman. Berikut :

1) Kota Global

Kota global merujuk pada kondisi yang mencerminkan Kota Balikpapan yang maju, modern, tangguh, inovatif, dan setara dengan kemajuan kota besar yang ada didunia. Kota global juga mencerminkan kesinambungan pembangunan yang semakin progresif diberbagai bidang seperti ekonomi, infrastruktur, sosial budaya, lingkungan, dan pelayanan publik. Kota Balikpapan sendiri memiliki posisi dan peran penting dalam pembangunan regional, nasional, maupun global. Balikpapan mendukung peran pembangunan wilayah Pulau Kalimantan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di kawasan Timur Indonesia. Sebagai Kawasan Perkotaan Besar, Kota Balikpapan juga memiliki peran besar terhadap pusat perdagangan barang dan jasa, serta industri yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

2) Nyaman untuk Semua

Nyaman untuk semua mencerminkan upaya menciptakan lingkungan, layanan, dan kebijakan yang dapat dinikmati dan diakses oleh semua kalangan tanpa memandang latar belakang, fisik, usia, dan status sosial. Nyaman untuk semua bertujuan untuk memastikan pembangunan berjalan secara inklusif yang berfokus pada kenyamanan dan aksesibilitas bagi setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk semua juga merujuk pada realitas sosiokultural bahwa masyarakat Balikpapan yang cukup heterogen dan multikultur, sehingga menjadikan Kota Balikpapan sebagai kota milik bersama yang inklusif, damai dan kondusif.

3) Madinatul Iman Madinatul Iman merujuk kepada aspek spiritualitas yang mewarnai seluruh aktivitas penduduk Kota Balikpapan. Sebagai aspek spiritual, konsep madinatul iman memiliki lima prinsip sebagai berikut:

- a. Spiritualitas menjadi roh dari seluruh kegiatan masyarakat
- b. Manusia dengan spiritualitas menjadi pusat pembangunan
- c. Seluruh masyarakat ikut terlibat aktif dalam perencanaan dan implementasi rencana kota
- d. Transparansi dalam seluruh kegiatan masyarakat dan pemerintah
- e. Kolaborasi/kerjasama lebih diprioritaskan daripada kompetisi disegala aspek kehidupan

Sementara untuk Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih menjadi Misi Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun dan Mengembangkan Pemerintah yang Bersih dan Profesional yang Berorientasi Pada Pelayanan Masyarakat;
- 2) Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur yang Bisa Memenuhi Seluruh Kebutuhan Masyarakat Balikpapan;

- 3) Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan Terdidik;
- 4) Mengembangkan Perekonomian yang Tumbuh Berkeadilan untuk Manusia;
- 5) Konsisten Menjaga Lingkungan Hidup yang Sehat dan Nyaman untuk Semua.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan memiliki keterkaitan dengan Misi ke 1 dan Misi ke 3 dari RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029. Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan berperan untuk Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM. Oleh karena itu, Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9  
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Penyebab masalah /Akar Masalah
Tingginya pengangguran terbuka	Masih Rendahnya Penempatan Tenaga Kerja	1. Penempatan tenaga kerja terdidik pada sector formal belum optimal 2. Link and Match pencaker dengan pasar kerja masih rendah 3. Pasar kerja yg tersedia memerlukan kompetensi teknis yg belum dimiliki pencaker yg tersedia 4. Perluasan Pasar Kerja Formal dan Informal Belum Optimal 5. Tingginya pertambahan penduduk dari Migrasi 6. proyek strategis nasional yang menggunakan kontraktor nasional cenderung berdampak pada penempatan pekerja dari luar Kota Balikpapan
	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pelatihan Kerja terhadap Calon Tenaga Kerja	1. Fasilitas dan sarana Pelatihan di Balikpapan/Kaltim sesuai kebutuhan pasar kerja masih terbatas 2. Uji kompetensi masih terbatas dan mahal 3. Partsipasi perusahaan dalam pelaksanaan magang mandiri belum optimal 4. Masih minim LSP di Kota Balikpapan 5. LPK Swasta yang terakreditasi masih sedikit (LPK terakreditasi 12 Jumlah LPK keseluruhan 48)
Masalah Pokok	Masalah	Penyebab masalah /Akar Masalah

	Angka Perselisihan Hubungan Industrial masih tinggi	1. Pemahaman terkait dengan Syarat Kerja Belum Sepenuhnya Dipahami Baik Oleh Pekerja Maupun Perusahaan 2. Masih banyak pekerja yang tidak memahami aturan ketenagakerjaan 3. Jumlah mediator masih sangat tidak sebanding dengan jumlah perusahaan/pekerja 4. Regulasi sangsi pelanggaran prosesnya sangat panjang dan belum tegas 5. Regulasi ketenagakerjaan yang cenderung berubah-ubah
--	---	--

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan

**2.2.2. Isu Strategis**

Seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya kemajuan teknologi terutama teknologi informasi serta kondisi masa depan yang terus berkembang dengan adanya percepatan era distrupsi, dapat mendatangkan peluang dan ancaman apabila tidak dipersiapkan dengan matang. Memasuki era revolusi industri 4.0 yang saat ini berlangsung dengan mengoptimalisasi penggunaan teknologi canggih dan teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjang dengan perkembangan ekonomi digital.

Semakin maraknya perkembangan bisnis dan transaksi perdagangan yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi antar perusahaan ataupun antar individu menjadi tantangan strategis bagi ketenagakerjaan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan upaya-upaya yang bersifat komprehensif termasuk upaya kebijakan, strategi dan program pembangunan terutama di bidang ketenagakerjaan. Seluruh upaya tersebut, yang terkait dengan aspek-aspek ketenagakerjaan, secara menyeluruh harus mencakup perluasan kesempatan kerja, pembinaan angkatan kerja dan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Sehingga diharapkan permasalahan ketenagakerjaan yang ada dapat teratasi

Adapun isu strategis yang menjadi prioritas Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Masih Rendahnya Penempatan Tenaga Kerja
2. Belum Optimalnya Pelaksanaan Pelatihan Kerja terhadap Calon Tenaga Kerja
3. Angka Perselisihan Hubungan Industrial masih tinggi

Tabel 2.10  
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Ketenagakerjaan  
Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Dinas Ketenagakerjaan	Permasalahan Dinas Ketenagakerjaan	Isu KLHS yang relevan dengan Dinas Ketenagakerjaan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis Dinas Ketenagakerjaan
			Global	Nasional	Regional	
<b>Kota Balikpapan merupakan kota yang strategis dalam Master Plan Pengembangan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI)</b>	belum optimalnya penempatan/ penyerapan tenaga kerja lokal	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ TPB 8 - Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)	tingginya angka pengangguran, rendahnya kualitas tenaga kerja, hingga ketimpangan upah dan perlindungan sosial	Prioritas Nasional 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan SDM Berdaya Saing dan Perlindungan Sosial	Penempatan tenaga kerja belum optimal,
	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pelatihan Kerja terhadap Calon Tenaga Kerja					
	Masih tingginya Angka Perselisihan Hubungan Industrial					

BAB III  
TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, DAN  
ARAH KEBIJAKAN

---

**3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketenagakerjaan**

Tujuan strategis merupakan penjabaran implemetasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Secara rinci tujuan yang ditetapkan selama kurun waktu lima tahun adalah menurunnya angka pengangguran di Kota Balikpapan .

Adapun tujuan strategis tersebut diuraikan menjadi beberapa sasaran dan ditetapkan indikator – indikator capaiannya sehingga menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4			-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
<b>2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KETENAGAKERJAAN</b>													
- Menurunnya pengangguran	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	persentase penduduk usia kerja (biasanya 15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja (baik bekerja maupun mencari pekerjaan) dibandingkan dengan total penduduk usia kerja	(Jumlah Angkatan Kerja / Jumlah Penduduk Usia Kerja) x 100%	63.48	63.7	63.98	64.48	64.98	65.48	65.98	Data BPS
		Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja di Sektor Formal	Persentase peningkatan Penempatan Tenaga Kerja di Sektor Formal (%)	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja di sektor formal tahun N dibandingkan dengan N-1	((Penempatan tenaker N - Penempatan tenaker N-1)/Penempatan tenaker N-1)*100%	-1.12	0.28	0.38	0.48	0.58	0.68	0.78	Data Naker

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan seberapa baik perangkat daerah tersebut dalam merencanakan melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya.	diperoleh dari evaluasi internal yang dilakukan oleh inspektorat daerah (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Nilai Evaluasi AKIP = Nilai komponen perencanaan kinerja+ Nilai komponen pengukuran kinerja+ Nilai Komponen Pelaporan Kinerja+ Nilai Evaluasi Akuntabilitas	65.19	65.2	65.3	65.5	65.7	65.9	66.2	Data Naker

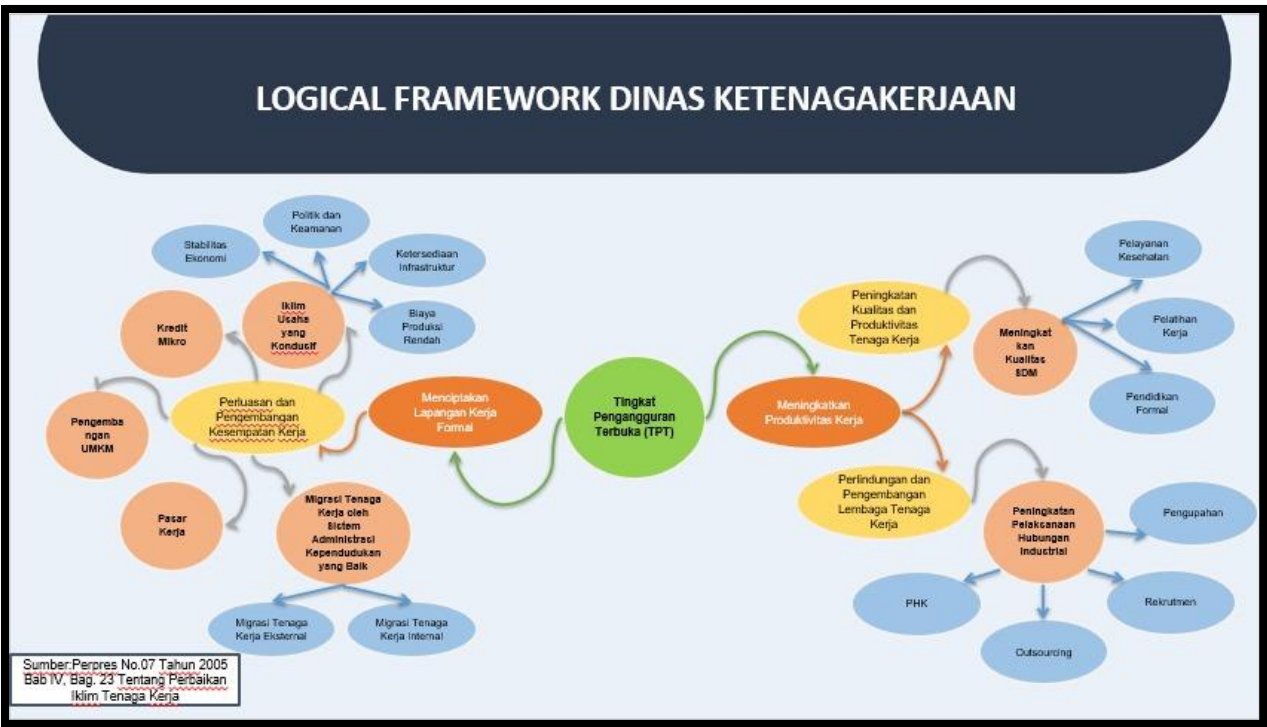
Sumber : Disnaker kota Balikpapan

Gambar 4.1  
Cascading Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan

Visi	Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua dalam Bingkai Madinatul Iman				
Misi	Membangun dan Mengembangkan Pemerintah yang Bersih dan Profesional yang Berorientasi Pada Pelayanan Masyarakat	Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan Terdidik			
Tujuan	Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas	Menurunnya Pengangguran Masyarakat			
Indikator Tujuan	Indeks Pelayanan Publik	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			
Sasaran	Terciptanya Tata Kelola Organisasi yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel	Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja			
Indikator Sasaran	Nilai SAKIP OPD	Persentase peningkatan Penempatan Tenaga Kerja			
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Program Penempatan dan Perluasan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Hubungan Industrial
Indikator Program	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama
Bidang	Sekretariat	Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja		Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bidang Hubungan Industrial

Sumber : Disnaker kota Balikpapan

Gambar 4.2  
Logical Framework Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan



Sumber: Disnaker Kota Balikpapan

3.2. Strategi Perangkat Daerah

Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan cara mewujudkan sasaran OPD, sedangkan Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.



Tabel 3.2  
Penahapan Renstra Dinas Ketenagakerjaan

<b>Tahap I (2026)</b>	<b>Tahap II (2027)</b>	<b>Tahap III (2028)</b>	<b>Tahap IV (2029)</b>	<b>Tahap V (2030)</b>
Optimalisasi Pelaksanaan Pelatihan Kerja Bekerja sama dengan LPK dan atau BLK yang ada di Balikpapan	Optimalisasi Pelaksanaan Pelatihan Kerja Bekerja sama dengan LPK dan atau BLK yang ada di Balikpapan maupun Balai Latihan Kementrian (PPSDM Cepu dengan Alokasi APBD) serta melibatkan Program CSR untuk Pelatihan Kerja	Peningkatan Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Kerja Bekerja sama dengan LPK dan atau BLK yang ada di Balikpapan maupun Balai Latihan Kementrian (PPSDM Cepu dengan Alokasi APBD) serta melibatkan Program CSR untuk Pelatihan Kerja	Peningkatan Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Kerja Bekerja sama dengan LPK dan atau BLK yang ada di Balikpapan maupun Balai Latihan Kementrian (PPSDM Cepu dengan Alokasi APBD) serta melibatkan Program CSR untuk Pelatihan Kerja	Tercapainya target Penempatan Tenaga Kerja Terdaftar minimal 37,5%

*Sumber: Disnaker Kota Balikpapan*

### **3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah**

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Selanjutnya kebijakan yang dibuat harus dapat :

1. membantu menghubungkan strategi pada sasaran secara lebih rasional;
2. memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/*focus*, konkrit, dan operasional;
3. mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
4. mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi OPD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dan kepentingan umum.

Tabel 3.3  
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
<p><b>Belum ada NSPK bidang ketenagakerjaan. Regulasi terakhir adalah SPM Bidang ketenagakerjaan (Kemnaker No. 2 Tahun 2014)</b></p>	<p>Misi 1: Membangun dan mengembangkan pemerintahan yang bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan masyarakat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan tata kelola kelembagaan dan birokrasi</li> <li>- Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional</li> <li>- Memperkuat aksi pencegahan korupsi</li> </ul> <p>Misi 3: Membangun dan mengembangkan kehidupan sosial yang kondusif untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan terdidik :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan kompetensi angkatan kerja yang bertalenta</li> <li>- Penguatan kemitraan dengan lembaga pelatihan, dunia usaha, dan dunia industri</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Program Pelatihan Kerja dan produktivitas tenaga kerja melalui BLK, Kementrian, maupun provinsi dan LPK Swasta serta pelaksanaan pemagangan kerja</li> <li>2. Peningkatan akses pencari kerja melalui informasi pasar kerja dan bursa kerja</li> <li>3. Peningkatan kualitas informasi pasar kerja melalui penyusunan dokumen perencanaan tenaga kerja makro dan mikro serta peningkatan kualitas media informasi pasar kerja secara elektronik.</li> <li>4. Peningkatan kualitas perangkat hubungan industrial melalui sosialisasi, pembinaan, membuka ruang konsultasi</li> <li>5. Peningkatan kapasitas serikat pekerja dan pengusaha melalui penguatan kelembagaan dan sosialisasi</li> </ol>	

BAB IV

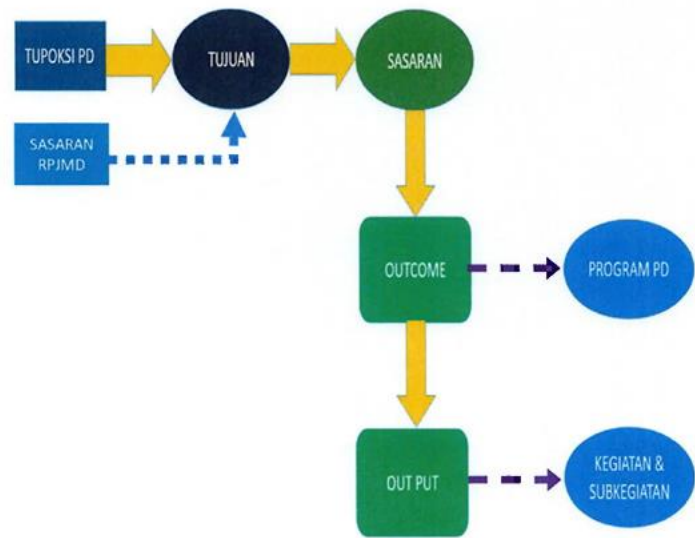
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN  
BIDANG URUSAN

---

Program dan kegiatan merupakan penjabaran dari sasaran yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini dijabarkan uraian program dan kegiatan yang menjadi prioritas maupun penunjang kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan periode 2025 – 2029 :

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  
Dinas Ketenagakerjaan



**4.1. Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Berdasarkan arah Kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan sesuai dengan RPJMD Kota Balikpapan periode 2022-2026, yaitu Meningkatkan perluasan lapangan pekerjaan, meningkatkan kompetensi dan produktivitas angkatan kerja, memperluas perlindungan dan jaminan social, serta meningkatkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan keterampilan dan perluasan akses modal, maka ditetapkan program, Kegiatan, dan Sub kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, yaitu :

Tabel. 4.1

## Teknik Merumuskan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan

## Renstra Dinas Ketenagakerjaan

<b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program/Kegiatan/ Subkegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
Menurunnya pengangguran terbuka	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		
		Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja di Sektor Formal			Persentase peningkatan Penempatan Tenaga Kerja di Sektor Formal		
			Meningkatnya pencari kerja yang mendapat pelatihan yang ditempatkan		<b>Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan yang Terserap dalam dunia kerja</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	
				Meningkatnya Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan	<b>Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	
				Meningkatnya Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang dibina	<b>Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang dibina</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	
					Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	
				Meningkatnya pembinaan produktivitas pada perusahaan kecil	<b>Jumlah pembinaan peningkatan produktivitas pada perusahaan kecil</b>	<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	
					Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	
				Meningkatnya Perusahaan yang telah melakukan pengukuran Produktivitas	<b>Jumlah Perusahaan yang telah melakukan pengukuran Produktivitas</b>	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
					Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	
			Terkelolanya informasi tenaga kerja		<b>Persentase Perusahaan yang telah memiliki Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	
				Meningkatnya dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun	<b>Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun</b>	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	
					Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro yang disusun dan Dokumen Kajian Akademis	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Kajian akademis Perda Ketenagakerjaan	
					Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan Penyusunan RTK Mikro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	

<b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program/Kegiatan/Subkegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
			Meningkatnya Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan di sektor Formal		<b>Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	
				Meningkatnya pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	<b>Jumlah pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja</b>	<b>Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	
					Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	Pelayanan Antar Kerja	
					Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	
					Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	
					Jumlah Tenaga Kerjayang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja	



<b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program/Kegiatan/ Subkegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
				Meningkatnya perusahaan yang tergabung pada sistem loker Disnaker	<b>Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada sistem loker Disnaker</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	
					Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	
					Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pekerjaan melalui Jobfair / Bursa Kerja	Job Fair / Bursa Kerja	
				Meningkatnya PMI ( Pra dan Purna Penempatan ) yang dilayani	<b>Persentase PMI ( Pra dan Purna Penempatan ) yang dilayani</b>	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	
					Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
			Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis		<b>Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	
				Meningkatnya Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan	<b>Persentase Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	
					Jumlah Perusahaan yang menyusun PP	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
					Perjanjian Kerja Bersama	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	
					Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	

<b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program/Kegiatan/Subkegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
				Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	<b>Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	
					Jumlah Perselisihan yang dapat dicegah	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perkara Perselisihan yang dapat diselesaikan	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
					Jumlah Asosiasi Pengusaha	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	
					Jumlah Serikat Pekerja yang Diverifikasi		
					Jumlah LKS Tripartit yang dibina	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			Nilai SAKIP OPD		

<b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program/Kegiatan/Subkegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Ortal)</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
				Meningkatnya Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
					Jumlah dokumen perencanaan DISNAKER (Renstra dan Renja, Perjanjian Kinerja)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja (LKJiP dan Evaluasi Renja)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
				Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<b>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Pelayanan Prima	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
				Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
					Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Baham Logistik Kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Meningkatnya Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang disediakan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
					Jumlah Laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

#### A. Program Pelatihan Kerja & Produktivitas Tenaga Kerja

- 1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi;
  - Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi
- 2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
  - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
- 3) Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil.
  - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
- 4) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

#### B. Program Perencanaan Tenaga Kerja

- 1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
  - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro;
  - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro.

#### C. Program Penempatan Tenaga Kerja

- 1) Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota;
  - Pelayanan Antar Kerja;
  - Penulisan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja;
  - Penyelenggaraan layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
  - Perluasan Kesempatan Kerja.
- 2) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
  - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online;
  - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online;
  - *Job Fair* / Bursa Kerja.
- 3) Perlindungan PMI (Pra dan Purna penempatan) di daerah;
  - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI);
  - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran;
  - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan.
- 4) Penerbitan, Perpanjangan IMTA ang Lokasi Kerja dalam 1 Daerah.
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

#### D. Program Hubungan Industrial.

- 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
  - Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan
  - Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Bagi Perusahaan;
  - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan.
- 2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota.
  - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota;
  - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota;
  - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi;

Dalam rangka mengoptimalkan capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, maka ditetapkan program dan kegiatan pendukung sebagaimana diuraikan berikut ini :

#### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - Penediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - Koordinasi dan penusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya;
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - Penyediaan peralatan rumah tangga;

- Penyediaan bahan logistic kantor;
  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
  - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang disediakan;
  - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Penyediaan Jasa Surat-menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

#### B. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- 1) Survey IKM pelayanan Bidang Penta;
  - Survey IKM Pelayanan antar kerja
  - Survey IKM pelayanan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.
- 2) Survey IKM pelayanan Bidang Lattas;
  - Survey IKM pelayanan Pelatihan berdasarkan unit Kompetensi;
- 3) Survey IKM pelayanan Bidang HI;
  - Survey IKM pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan;
- 4) Survey Layanan Internal Dinas Ketenagakerjaan oleh Sekretariat.
  - Survey IKM pelayanan Internal oleh Sekretariat.

Rencana program dan kegiatan prioritas Disnaker periode 2025-2029 dijelaskan pada Tabel 6.2 di bawah ini :

Tabel 4.2  
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan  
Periode 2026 – 2030

Bidang Urusan/Program	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
SASARAN : Terciptanya Tata Kelola Organisasi yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel	Nilai SAKIP OPD	Nilai	65,19	65,7	13.251.393.000	65,5	20.225.780.507	65,7	22.857.147.583	65,9	26.285.719.720	66,20	30.228.577.678
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Ortal)	Persen	93,07	93,1%	10.705.975.939	93,20	14.608.065.636	93,30%	16.799.275.481	93,40%	19.319.166.803	93,5	22.217.041.824
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	92,16	92,3	-	92,5	75.000.000	92,8	86.250.000	93,0	99.187.500	93,3	114.065.625
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan DISNAKER (Renstra dan Renja, Perjanjian Kinerja)	Dokumen	3	3	-	2	75.000.000	2	86.250.000	2	99.187.500	2	114.065.625
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja (LKJiP dan Evaluasi Renja)	Dokumen	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-

Bidang Urusan/Program	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Nilai	<b>85,36</b>	<b>85,5</b>	<b>8.913.576.000</b>	<b>85,6</b>	<b>11.495.317.614</b>	<b>85,7</b>	<b>13.219.615.256</b>	<b>85,8</b>	<b>15.202.557.545</b>	85,9	<b>17.482.941.176</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	32	37	8.913.576.000	41	11.495.317.614	44	13.219.615.256	47	15.202.557.545	50	17.482.941.176
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Nilai	<b>83,97</b>	<b>84,1</b>	<b>482.708.000</b>	<b>84,2</b>	<b>584.324.775</b>	<b>84,3</b>	<b>671.973.491</b>	<b>84,4</b>	<b>772.769.515</b>	84,5	<b>888.684.942</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	1	32.708.000	2	66.824.775	2	76.848.491	2	88.375.765	2	101.632.130
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Pelayanan Prima	Orang	34	37	450.000.000	43	517.500.000	46	595.125.000	49	684.393.750	52	787.052.813
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Nilai	<b>83,97</b>	<b>84,1</b>	<b>722.182.444</b>	<b>84,2</b>	<b>1.329.861.883</b>	<b>84,3</b>	<b>1.529.341.165</b>	<b>84,4</b>	<b>1.758.742.340</b>	84,5	<b>2.022.553.691</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	0						-		-		-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	13	16	26.090.770	1	30.004.386	1	34.505.043	1	39.680.800	1	45.632.920
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	9	4	6.999.510	1	59.465.142	1	68.384.913	1	78.642.650	1	90.439.048

Bidang Urusan/Program	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Baham Logistik Kantor yang disediakan	Paket	54	45	326.108.940	10	512.679.700	10	589.581.655	10	678.018.904	10	779.721.739
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	8756	7	51.857.780	1	59.636.447	1	68.581.914	1	78.869.201	1	90.699.581
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	226	283	311.125.444	380	610.576.208	435	702.162.639	500	807.487.035	535	928.610.090
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	5	0	-	10	57.500.000	10	66.125.000	10	76.043.750	10	87.450.313
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Nilai</b>	<b>83,97</b>	<b>84,1</b>	<b>162.525.045</b>	<b>84,2</b>	<b>506.658.872</b>	<b>84,3</b>	<b>582.657.703</b>	<b>84,4</b>	<b>670.056.358</b>	84,5	<b>770.564.812</b>
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang disediakan	Unit	13	1	93.600.000	3	176.318.345	3	202.766.097	3	233.181.011	3	268.158.163
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	12	8	68.925.045	19	330.340.527	19	379.891.606	19	436.875.347	19	502.406.649
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Nilai</b>	<b>83,97</b>	<b>84,1</b>	<b>90.860.000</b>	<b>84,2</b>	<b>169.659.500</b>	<b>84,3</b>	<b>195.108.425</b>	<b>84,4</b>	<b>224.374.689</b>	84,5	<b>258.030.892</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	4.190.000	1	4.818.500	1	5.541.275	1	6.372.466	1	7.328.336
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	6	3	30.000.000	5	34.500.000	5	39.675.000	5	45.626.250	5	52.470.188

Bidang Urusan/Program	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	7	13	56.670.000	2	130.341.000	2	149.892.150	2	172.375.973	2	198.232.368
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Nilai</b>	<b>83,97</b>	<b>84,1</b>	<b>334.124.450</b>	<b>84,2</b>	<b>447.242.993</b>	<b>84,3</b>	<b>514.329.441</b>	<b>84,4</b>	<b>591.478.858</b>	84,5	<b>680.200.686</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	16	15	277.392.450	14	367.566.853	14	422.701.880	14	486.107.162	14	559.023.237
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	7	68	56.732.000	82	79.676.140	82	91.627.561	82	105.371.695	82	121.177.449
<b>SASARAN : Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja</b>	<b>Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja</b>	<b>Nilai</b>	<b>-1,12</b>	<b>0,38</b>	<b>2.545.417.061</b>	<b>0,48</b>	<b>5.617.714.871</b>	<b>0,58</b>	<b>6.057.872.102</b>	<b>0,68</b>	<b>6.966.552.917</b>	<b>0,78</b>	<b>8.011.535.854</b>
<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalurkan</b>	<b>Persen</b>	<b>75</b>	<b>42%</b>	<b>1.360.781.331</b>	<b>46%</b>	<b>3.144.524.218</b>	<b>48%</b>	<b>3.616.202.850</b>	<b>50%</b>	<b>4.158.633.278</b>	52	<b>4.782.428.270</b>
<b>Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>100</b>	<b>2.721.360.000</b>	<b>100</b>	<b>3.129.564.000</b>	<b>100</b>	<b>3.598.998.600</b>	100	<b>4.138.848.390</b>
Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	Orang	96	64	1.150.000.000	150	2.721.360.000	155	3.129.564.000	160	3.598.998.600	<b>165</b>	4.138.848.390



Bidang Urusan/Program	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang dibina</b>	<b>Persen</b>	<b>0</b>	<b>71%</b>	<b>73.593.777</b>	<b>72%</b>	<b>84.632.844</b>	<b>73%</b>	<b>97.327.770</b>	<b>74%</b>	<b>111.926.936</b>	<b>75</b>	<b>128.715.976</b>
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	0	30	73.593.777	30	84.632.844	30	97.327.770	30	111.926.936	30	128.715.976
<b>Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>Jumlah pembinaan peningkatan produktivitas pada perusahaan kecil</b>	<b>Kali</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>73.593.777</b>	<b>6</b>	<b>253.898.531</b>	<b>6</b>	<b>291.983.310</b>	<b>6</b>	<b>335.780.807</b>	<b>6</b>	<b>386.147.928</b>
Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	39	20	73.593.777	120	253.898.531	120	291.983.310	120	335.780.807	120	386.147.928
<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Perusahaan yang telah melakukan pengukuran Produktivitas</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>63.593.777</b>	<b>30</b>	<b>84.632.844</b>	<b>30</b>	<b>97.327.770</b>	<b>30</b>	<b>111.926.936</b>	<b>30</b>	<b>128.715.976</b>
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	0	30	63.593.777	30	84.632.844	30	97.327.770	30	111.926.936	30	128.715.976

Bidang Urusan/Program	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun</b>	<b>Persen</b>	<b>3,1</b>	<b>3,6%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>3,65%</b>	<b>534.138.313</b>	<b>3,7%</b>	<b>211.759.060</b>	<b>3,75%</b>	<b>243.522.919</b>	<b>3,8</b>	<b>280.051.356</b>
<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100.000.000</b>	<b>2</b>	<b>534.138.313</b>	<b>1</b>	<b>211.759.060</b>	<b>1</b>	<b>243.522.919</b>	<b>1</b>	<b>280.051.356</b>
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Kajian akademis Perda Ketenagakerjaan	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro yang disusun dari Dokumen Kajian Akademis	Dokumen	0	0		1	350.000.000			-			-
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan Penyusunan RTK Mikro	Orang	45	20	100.000.000	52	184.138.313	53	211.759.060	55	243.522.919	57	280.051.356
<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan</b>	<b>Persen</b>	<b>36,99</b>	<b>37,1</b>	<b>492.873.075</b>	<b>37,2</b>	<b>947.886.974</b>	<b>37,3</b>	<b>1.090.070.020</b>	<b>37,4</b>	<b>1.253.580.523</b>	<b>37,5</b>	<b>1.441.617.602</b>
<b>Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja</b>	<b>Orang</b>	<b>4253</b>	<b>4375</b>	<b>216.999.900</b>	<b>4497</b>	<b>541.689.328</b>	<b>4619</b>	<b>622.942.727</b>	<b>4741</b>	<b>716.384.136</b>	<b>4861</b>	<b>823.841.756</b>
Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	1573	1623	80.000.000	1673	184.000.000	1723	211.600.000	1773	243.340.000	1823	279.841.000
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	480	480	66.999.900	480	77.049.885	480	88.607.368	480	101.898.473	<b>480</b>	117.183.244
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Orang	8	10	70.000.000	12	80.500.000	14	92.575.000	16	106.461.250	18	122.430.438

Bidang Urusan/Program	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Perluasan Kesempatan Kerja	JumlahTenaga Kerjayang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	0	0	-	45	200.139.443	50	230.160.359	55	264.684.413	60	304.387.075
<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada sistem loker Disnaker</b>	<b>Persen</b>	<b>5,3</b>	<b>5,5%</b>	<b>220.873.175</b>	<b>5,6%</b>	<b>342.947.646</b>	<b>5,7%</b>	<b>394.389.793</b>	<b>5,8%</b>	<b>453.548.262</b>	5,9	<b>521.580.502</b>
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	1	25.000.000	1	69.000.000	1	79.350.000	1	91.252.500	1	104.940.375
Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pekerjaan melalui Jobfair / Bursa Kerja	Orang	684	685	195.873.175	685	273.947.646	685	315.039.793	685	362.295.762	<b>685</b>	416.640.127
<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase PMI ( Pra dan Purna Penempatan ) yang dilayani</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>55.000.000</b>	<b>100</b>	<b>63.250.000</b>	<b>100</b>	<b>72.737.500</b>	<b>100</b>	<b>83.648.125</b>	100	<b>96.195.344</b>
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Orang	23	33	55.000.000	38	63.250.000	43	72.737.500	48	83.648.125	<b>53</b>	96.195.344

Bidang Urusan/Program	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama</b>	<b>Persen</b>	<b>54,9</b>	<b>55%</b>	<b>591.762.655</b>	<b>56%</b>	<b>991.165.366</b>	<b>57%</b>	<b>1.139.840.171</b>	<b>58%</b>	<b>1.310.816.197</b>	<b>59</b>	<b>1.507.438.626</b>
<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan</b>	<b>Persen</b>	<b>84,6</b>	<b>85%</b>	-	<b>86%</b>	-	<b>87%</b>	-	<b>88%</b>	-	<b>89</b>	-
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang menyusun PP	Perusahaan	45	50	-	55	-	60	-	65	-	<b>70</b>	-
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan	3	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	29	35	-	40	-	45	-	50	-	55	-

Bidang Urusan/Program	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan</b>	<b>Persen</b>	<b>54,9</b>	<b>62%</b>	<b>591.762.655</b>	<b>64%</b>	<b>991.165.366</b>	<b>66%</b>	<b>1.139.840.171</b>	<b>68%</b>	<b>1.310.816.197</b>	<b>70</b>	<b>1.507.438.626</b>
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dapat dicegah	Kasus	203	225	112.584.400	250	152.472.060	275	175.342.869	300	201.644.299	325	231.890.944
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang dapat diselesaikan	Kasus	28	40	117.739.500	40	169.900.425	40	195.385.489	40	224.693.312	40	258.397.309
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha	Asosiasi	1	1	137.739.508	1	169.900.434	1	195.385.499	1	224.693.324	1	258.397.323
	Jumlah Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Serikat Pekerja	7	16	-	17	-	18	-	19	-	20	-

Bidang Urusan/Program	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	Lembaga	1	1	173.699.247	1	314.754.134	1	361.967.254	1	416.262.342	1	478.701.694
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	7140	40	50.000.000	42	184.138.313	44	211.759.060	46	243.522.919	48	280.051.356

Tabel 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan daerah

No	Program	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya pencari kerja yang mendapat pelatihan yang ditempatkan	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
			Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
			Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
			Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

No	Program	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan di sektor Formal	<b>Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>
			Pelayanan Antar Kerja
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
			Perluasan Kesempatan Kerja
			<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>
			Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
			Job Fair / Bursa Kerja
			<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>
			Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
3	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Terkelolanya informasi tenaga kerja	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Kajian akademis Perda Ketenagakerjaan
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
			Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
			Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

No	Program	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan
			<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota</b>
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja



4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Penetapan indikator kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dengan Wali Kota Balikpapan pada setiap tahunnya dalam periode RPJMD/RENSTRA dan secara berjenjang (*cascading*) ditetapkan pula perjanjian kinerja dari eselon IV ke eselon III, dan dari eselon III ke eselon II, sehingga program maupun kegiatan yang disusun harus bermuara pada pencapaian indikator dan target kinerja dari setiap eselon.

Indikator dan target kinerja tersebut dapat dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mana dalam Perjanjian Kinerja akan dievaluasi setiap tahun melalui Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Ketenagakerjan Kota Balikpapan.

Indikator kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Balikpapan periode 2025-2030 diuraikan pada table 4.4 berikut ini :

Tabel 4.4  
Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan  
Kota Balikpapan Periode 2025 – 2030

No	INDIKATOR	Satuan	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KETENAGAKERJAAN								
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	%	63.7	63.98	64.48	64.98	65.48	65.98	
2	Persentase peningkatan Penempatan Tenaga Kerja di Sektor Formal (%)	%	0.28	0.38	0.48	0.58	0.68	0.78	
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	65.2	65.3	65.5	65.7	65.9	66.2	

Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) adalah Indikator tujuan Dinas Ketenagakerjaan yang merupakan jembatan untuk menurunkan indicator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketenagakerjaan dengan Sasaran RPJMD Kota Balikpapan yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Dari penjelasan diatas, menunjukan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebenarnya bukan merupakan hasil kinerja murni Dinas Ketenagakerjaan. Namun demikian indicator ini tetap dimasukan sebagai indicator kerja disnaker untuk mendapatkan benang merah antara Sasaran RPJMD dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan.

4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketenagakerjaan

Kota Balikpapan Periode 2025 – 2030

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KETENAGAKERJAAN								
1	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Rencana Tenaga Kerja (RTK)	%	3,5	3,6	3,65	3,7	3,75	3,8	
2	Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan yang Terserap dalam dunia kerja	%	40	42	46	48	50	52	
3	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	37	37,1	37,2	37,3	37,4	37,5	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	55,25	55,5	55,75	56	56,25	56,5	

## BAB V

### PENUTUP

---

Rencana Strategis Satuan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029 ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029 di bidang Ketenagakerjaan. Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya bahwa Renstra SKPD ini disusun dengan mempertimbangkan Aspek Legalitas, Aspek Perimbangan Kewenangan Pusat dan Daerah terutama dalam era otonomi pembangunan dan aspek perencanaan strategis, dikemukakan pula Visi, Misi dan selanjutnya dirumuskan kedalam prioritas kebijakan pembangunan, serta melalui penetapan Tujuan, Strategi, Sasaran, Kebijakan, dan Program Pembangunan.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pemerintah Kota Balikpapan untuk tercapainya sasaran Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Kalimantan Timur. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Ketenagakerjaan ini akan menjadi acuan dalam Penilaian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dalam 5 tahun ke depan. Semoga upaya Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dalam 5 tahun dapat lebih terarah dan terukur.

Harus diperhatikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Ketenagakerjaan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dan atau target kinerja sasaran Dinas Ketenagakerjaan.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah serta Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan. Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan target kinerja Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan.

# I. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Hakekat pembangunan nasional meliputi pembangunan manusia seutuhnya yang meliputi masyarakat Indonesia, maka fungsi pembangunan daerah adalah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional secara utuh dan terpadu. Oleh karena itu, diperlukan hubungan yang serasi dan selaras antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah sebagai wujud dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengingat bahwa pembangunan daerah merupakan satu bagian dalam sistem pembangunan nasional yang bermuara pada kewenangan yang dimiliki masing-masing dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan juga untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul pada masyarakat.

Berbagai permasalahan yang mendasar pada masyarakat dimaksud antara lain masih terdapatnya penduduk yang hidup di garis kemiskinan, tingginya angka kelahiran, tingginya angka migrasi, kualitas Indeks Pembangunan Manusia yang masih perlu perbaikan termasuk didalamnya Indeks Pembangunan Gender, ketahanan keluarga yang rapuh sehingga kasus perceraian juga meningkat setiap tahunnya, masih minimnya peran orang tua dalam hal pendampingan pengasuhan/ pengawasan kepada anak anaknya yang kemungkinan penyebabnya karena minimnya pengetahuan tentang pola asuh anak sehingga berdampak pada permasalahan sosial anak seperti meningkatnya kasus kejahatan seksual pada anak, pergaulan seks bebas pada anak, akses situs pornografi tidak terbandung/ terawasi, penyalahgunaan NAPZA oleh anak dan remaja meningkat, kenakalan anak dan remaja meningkat, dan lain lain permasalahan sosial yang ada yang semuanya ini bermuara pada aspek penduduk yang tidak atau kurang berkualitas.

Upaya penanganan selalu akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pendekatan sektoral maupun kewilayahannya serta melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan di Kota Balikpapan. Dalam kerangka meningkatkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi segenap potensi di Kota Balikpapan, khususnya yang terkait dengan Urusan Pengendalian Penduduk & KB, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibutuhkan sebuah upaya melalui proses penyusunan dokumen perencanaan strategi pembangunan terkait 3 (tiga) urusan di atas yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan di daerah Kota Balikpapan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu periode tahun 2025-2029 yang mana dokumen perencanaan dimaksud harus bersinergi dan selaras dengan target kinerja yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Balikpapan pada periode tahun 2025-2029, di sisi lain dokumen dimaksud nantinya diharapkan dapat sinergi pula dengan target kinerja yang sudah ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga (K/ L)

terkait pelaksanaan 3 (tiga) urusan dimaksud yang disesuaikan dengan kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh level pemerintah daerah terkait 3 (tiga) urusan tersebut, dimana ketiga jenis urusan dimaksud berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 merupakan urusan wajib yang bersifat konkuren serta bukan tergolong sebagai pelayanan dasar, sehingga tidak diatur SPM-nya oleh K/ L teknis terkait namun akan diterbitkan Norma Standar dan Prosedur Kerja (NSPK) oleh K/ L teknis terkait yang akan menjadi *guide* bagi pemerintah kab/ kota dalam menjalankan urusan dimaksud.

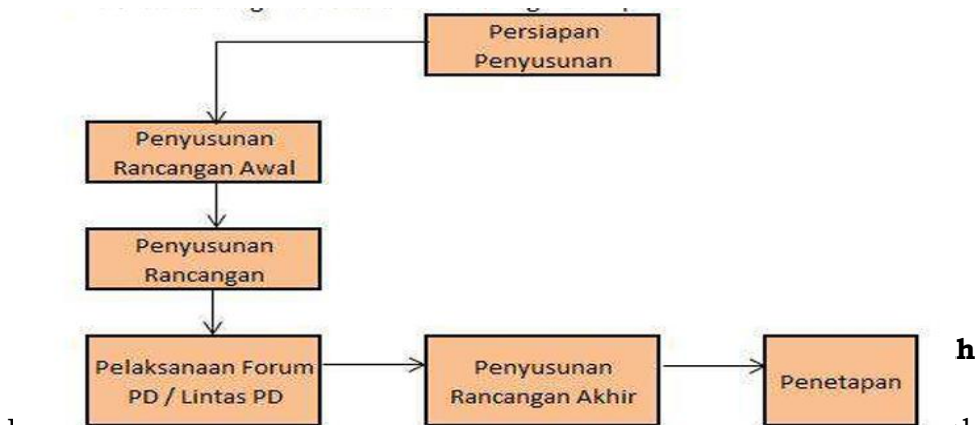
Sebagai tindak lanjut amanah dari UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka pada tahun 2021 ini merupakan tahun yang cukup strategis, dikatakan strategis karena pertimbangan bahwa pada tahun inilah Kepala Daerah di Kota Balikpapan telah terpilih dan dilantik pada tanggal 31 Mei 2021, ditambah lagi pada tahun inilah bentuk dan nomenklatur kelembagaan perangkat daerah DP3AKB Kota Balikpapan dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan pertimbangan bertambahnya jumlah urusan yang akan ditangani oleh DP3AKB per tahun 2022 yakni dari semula hanya menangani 2 (dua) urusan pada tahun 2016-2021 menjadi 3 (tiga) urusan sejak tahun 2022 yakni Urusan Pengendalian Penduduk & KB, Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Penyusunan dokumen RENSTRA perangkat daerah yang menangani 3 (tiga) urusan dimaksud dalam periode tahun 2025-2029 juga diharapkan sudah menyesuaikan dengan rencana dari bentuk kelembagaan yang terbaru nantinya, khususnya dalam penuangan kinerja tahun 2026-2029.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah, maka Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinas P3AKB) Kota Balikpapan periode Tahun 2025-2029 ini pun diharapkan mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dan dapat menjabarkan secara implementatif sesuai kewenangan yang dimiliki oleh perangkat daerah dalam bentuk penentuan atau penetapan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan, serta penetapan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang dalam penyusunannya dilakukan sesuai prioritas kebutuhan daerah (untuk mengatasi permasalahan di daerah sesuai kewenangan yang dimiliki, yang dalam proses pembahasannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan serta mengacu pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.

Sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan, maka yang dimaksud dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, dimana

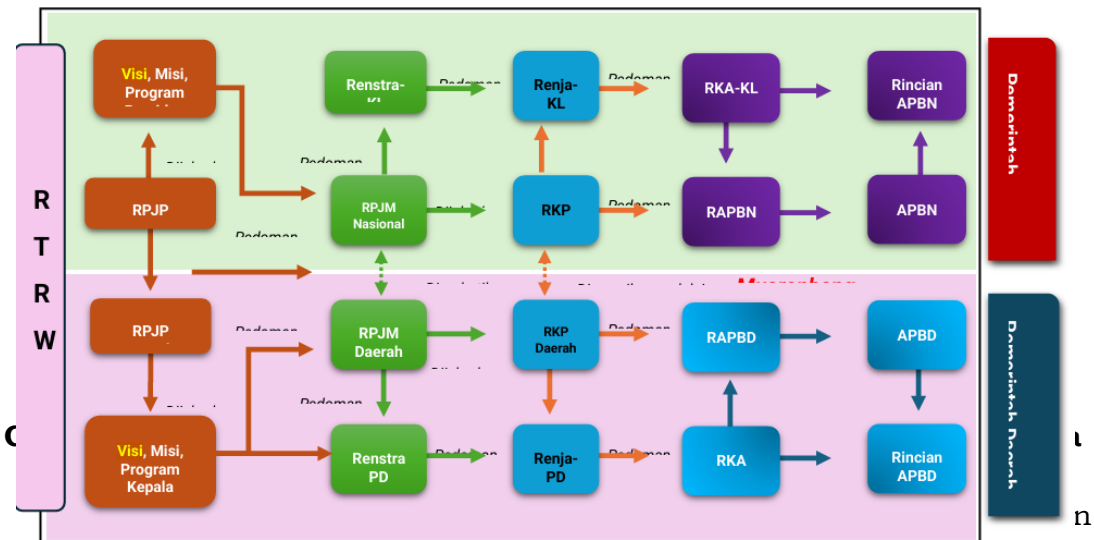
Renstra Perangkat Daerah yang berlandaskan pada RPJMD berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun melalui tahapan:

- Persiapan Penyusunan;
- Penyusunan Rancangan Awal;
- Penyusunan Rancangan;
- Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah;
- Perumusan Rancangan Akhir; dan
- Penetapan.



pendekatan perencanaan digunakan dan dipadukan di dalam dokumen. Selain pendekatan yang berorientasi proses, pendekatan perencanaan yang berorientasi substansi juga digunakan.

Gambaran hubungan Renstra dengan seluruh dokumen perencanaan makro dan tata ruang sebagai berikut:



kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Wajib sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif, maka penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinas P3AKB) Kota Balikpapan periode Tahun 2025-2029 ini merujuk kepada dokumen RPJMD Kota Balikpapan Periode Tahun 2025-2029 serta disesuaikan juga dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Balikpapan terkait 3 (tiga) urusan yang dimiliki sebagai penjabaran dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Balikpapan Periode 2025-2029 adalah: “**Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua dalam Bingkai Madinatul Iman.**”

Untuk mewujudkan Visi diatas, maka telah ditetapkan 5 (lima) misi, yakni:

1. ***Membangun dan Mengembangkan Pemerintah yang Bersih dan Profesional yang Berorientasi Pada Pelayanan Masyarakat***
2. ***Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur yang Bisa Memenuhi Seluruh Kebutuhan Masyarakat Balikpapan;***
3. ***Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan Terdidik;***
4. ***Mengembangkan Perekonomian yang Tumbuh Berkeadilan untuk Manusia;***
5. ***Konsisten Menjaga Lingkungan Hidup yang Sehat dan Nyaman untuk Semua.***

Dari uraian Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Balikpapan periode tahun 2025–2029 ini terdapat 9 Prioritas Kepala Daerah terpilih yang akan dijalankan, yaitu:

1. Transformasi Birokrasi;
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Mengatasi Stunting;
4. Penyediaan Air Bersih yang Sehat dan Merata;
5. Pengendalian Banjir;
6. Lingkungan Hidup dan Sosial yang Sehat dan Nyaman;
7. Balikpapan Kota MICE dan Wisata;
8. Balikpapan Kota Inovatif dan Kreatif
9. Balikpapan Kota Ramah Anak.

Dari uraian visi dan misi Kepala Daerah Kota Balikpapan periode tahun 2025-2029 dapat ditelaah dimana 1 (satu) dari 5 (lima) misi yang ada dalam dokumen RPJMD Kota Balikpapan periode Tahun 2025-2029 tersebut sangat relevan atau berkaitan secara eksplisit dengan 3 (tiga) urusan yang diamanahkan untuk ditangani oleh Dinas P3AKB Kota Balikpapan, terdapat pada misi ketiga RPJMD Kota Balikpapan tersebut yaitu ***Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan Terdidik.***

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Periode Tahun 2025-2029 tersebut di atas serta sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ditegaskan dalam ketentuan dimaksud bahwa pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Disamping itu, di dalam diktum kedua Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga ditegaskan tentang kewajiban Pejabat Pemerintah (sampai level eselon II) untuk menyusun/ mempunyai rencana strategi tentang program program utama yang akan dicapai selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Ketentuan-ketentuan inilah yang mendasari dan melatarbelakangi penyusunan dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinas P3AKB) Kota Balikpapan periode Tahun 2025-2029.

## **1.2. Dasar Hukum**

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas P3AKB Kota Balikpapan Periode Tahun 2025-2029 ini mempunyai landasan hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. UU Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
3. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor 104 Tahun 2004, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900. 1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah;



16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 06 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025–2029;
17. Peraturan Walikota Nomor 1 tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinas P3AKB) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

#### **1. Maksud**

Mendeskripsikan terhadap tujuan, sasaran dan strategi RENSTRA OPD yang berisikan kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif untuk mendukung kinerja OPD serta juga kesepakatan terhadap indikator kinerja dan target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinas P3AKB) Kota Balikpapan Periode Tahun 2025-2029.

#### **2. Tujuan**

Sebagai salah satu bahan masukan dalam penyusunan RPJMD Kota Balikpapan dan sekaligus sebagai pedoman, acuan atau rujukan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Pejabat Struktural, Fungsional dan staf pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinas P3AKB) Kota Balikpapan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Keseluruhan materi dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinas PPPAKB) ini disusun dan termuat dalam 5 (lima) BAB, dengan sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

#### **BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis PD**

Dalam bab ini dijelaskan gambaran umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinas P3AKB) Kota Balikpapan (gambaran umum terkait kelembagaan yang lama, belum dibahas tentang kelembagaan baru nantinya), gambaran umum yang dimaksud disini meliputi uraian tugas fungsi dan struktur Organisasi Perangkat Daerah (DP3AKB), Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Potensi & Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah, Penentuan Isu-Isu Strategis lingkup 2 (dua) urusan yang ditangani dan 1 (satu) urusan tambahan yang merupakan kewenangan Dinas DP3AKB Kota Balikpapan sejak Tahun 2022, serta Potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinas P3AKB) Kota Balikpapan.

#### **BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan**

Dalam bab ini dijelaskan terkait identifikasi permasalahan berdasarkan tugas fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Visi Misi dan Program

Kepala Daerah Terpilih, telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga terkait urusan yang ditangani serta Renstra di tingkat Provinsi, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, juga disampaikan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah kebijakan, Jangka Menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerja DP3AKB kota Balikpapan.

#### **BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Dalam bab ini disajikan indikasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Matriks Renstra dan Matriks Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinas P3AKB) Kota Balikpapan, indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (Dinas P3AKB) Kota Balikpapan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Balikpapan, penentuan kelompok sasaran yang menjadi target layanan serta penentuan besaran pendanaan indikatif untuk menjalankan 3 (Tiga) urusan pemerintahan yang diamanahkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinas P3AKB) Kota Balikpapan.

Pada bagian ini juga dikemukakan indikator kinerja DP3AKB yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama 5 tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup disertai pernyataan dimungkinkannya peluang terjadinya perubahan terhadap substansi dokumen Renstra yang perlu mendapat perhatian oleh seluruh pejabat struktural, fungsional dan staf pelaksana di lingkungan serta stakeholder lainnya sesuai tuntutan perubahan kebijakan, lingkungan strategis dan/ atau kemajuan ilmu dan teknologi.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **a. Tugas, fungsi dan struktur DP3AKB**

Memperhatikan bahwa dokumen RENSTRA Perangkat Daerah ini disusun pada tahun 2025, yang merupakan tahun transisi diprosesnya perubahan nama kelembagaan, dan memperhatikan pula bahwa dokumen ini merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah pada periode tahun 2025-2029 yang akan menjadi landasan operasional bagi perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, yakni periode tahun 2025-2029. Sehingga penyebutan nama kelembagaan pada BAB II ini khususnya yang menguraikan tentang sumber daya perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 / 2025, hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi masih menggunakan data nama dan analisis kelembagaan SKPD yang lama, yakni Dinas P3AKB Kota Balikpapan. Namun pada saat penentuan isu-isu berdasarkan tugas dan fungsi, tujuan, sasaran, kebijakan perangkat daerah serta penetapan indikator kinerja program-kegiatan dan sub

kegiatan perangkat daerah sudah meliputi 3 (tiga) urusan yang akan menjadi kewenangan perangkat daerah sejak tahun 2022.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor 1 tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan, mempunyai tujuan tugas dan fungsi sebagai berikut :

### **1. Tugas Pokok**

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan lainnya.

### **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

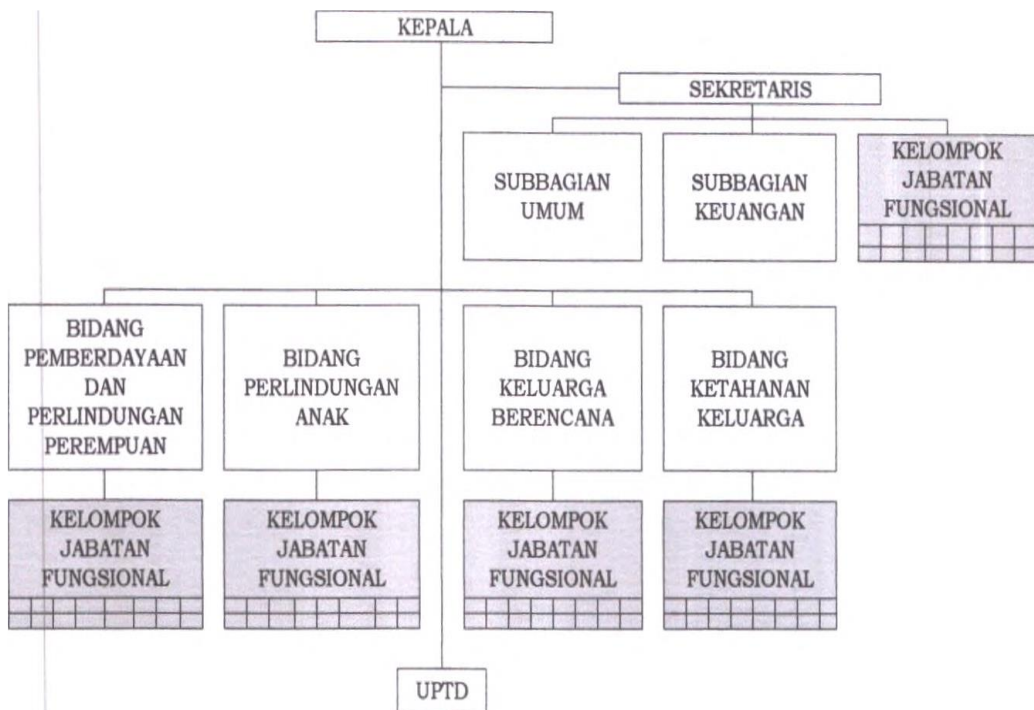
1. Perumusan kebijakan teknis kebijakan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan KB;
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pengendalian penduduk dan KB;
3. Pengoordinasian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan KB;
4. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan KB;
5. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan KB;
6. Pengoordinasian pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB;
7. Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi KB yang diberikan oleh pemerintah pusat;
8. Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan KB *Mobile* yang bersifat sosial (KB Momentum/ KB Keliling);
9. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

10. Pelaksanaan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah;
11. Pelaksanaan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Kota;
12. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
13. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;
14. Peningkatan kualitas keluarga, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga serta penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
15. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data;
16. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
17. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
18. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
19. Pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah;
20. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
21. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
22. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Struktur Organisasi**

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan yang dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mempunyai kedudukan yang merupakan unsur pendukung Wali Kota Balikpapan dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah khususnya yang terkait 2 (dua) urusan wajib Non Pelayanan Dasar yang bersifat konkuren yaitu urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak dan urusan Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana di kota Balikpapan, yang kesemuanya tentu saja bermuara pada upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKB)**  
**KOTA BALIKPAPAN**



**Gambar 1.3. Struktur Organisasi DP3AKB**

Terkait dengan penjabaran uraian tugas dan fungsi mulai Kepala Dinas sampai dengan staf ini merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi sampai akhir tahun 2025, namun per 01 Januari 2026 akan terdapat perubahan terkait urusan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, mengingat perubahan nomenklatur bidang-bidang yang mana sampai dengan disusunnya Renstra perangkat daerah ini, pembahasan terkait uraian tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sejak tahun 2026 belum mendapatkan hasil yang pasti dari pihak Bagian Ortala Setda Kota Balikpapan, sehingga dimungkinkan adanya penyesuaian terhadap Bab II dalam Renstra perangkat daerah ini pasca terbentuknya kelembagaan yang baru pada tahun 2026. Berikut uraian tugas dan fungsi Pejabat Struktural sesuai dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan:

**1. Kepala Dinas**

- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya;

- c. dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. penyusunan dokumen perencanaan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pengoordinasian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. pengoordinasian pelaksanaan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan program perlindungan perempuan;
- h. pengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan kualitas keluarga;
- i. pengoordinasikan pelaksanaan program pengelolaan sistem data gender dan anak;
- j. pengoordinasikan pelaksanaan program pemenuhan hak anak;
- k. pengoordinasikan pelaksanaan program perlindungan khusus anak;
- l. pengoordinasikan pelaksanaan program administrasi pemerintahan desa;
- m. pengoordinasikan pelaksanaan program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
- n. pengoordinasikan pelaksanaan program pengendalian penduduk;
- o. pengoordinasikan pelaksanaan program pembinaan keluarga berencana;
- p. pengoordinasikan pelaksanaan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
- q. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- r. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretaris**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian:

- a. perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
- b. administrasi keuangan;

- c. administrasi barang milik Daerah pada Dinas;
- d. administrasi kepegawaian;
- e. administrasi umum;
- f. pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah;
- g. pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah;
- h. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah;
- i. layanan informasi dan pengaduan; dan
- j. pembinaan pelayanan publik.

Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran dinas;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. pembinaan dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik;
- k. pengelolaan survei kepuasan masyarakat;
- l. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- m. pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksana;
- n. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
- o. pengoordinasian bidang dan UPTD;
- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat terdiri atas:

- 1. Subbagian Umum, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
  - b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
  - c. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana dan prasarana kantor;
  - d. menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
  - e. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan serta informasi layanan dan pengaduan;
  - f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
  - g. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
  - h. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;

- i. menyiapkan, meneliti dan memverifikasi usulan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik Daerah;
  - j. melaksanakan verifikasi, pencatatan dan inventarisasi barang milik Daerah yang dilaksanakan oleh pengurus barang dan/atau pengurus barang pembantu;
  - k. menyusun pengajuan usulan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik Daerah;
  - l. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik Daerah;
  - m. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh pengurus barang dan/atau pengurus barang pembantu;
  - n. mengoordinir, meneliti dan memverifikasi kartu inventaris ruangan setiap semester dan setiap tahun;
  - o. melaksanakan pemeliharaan barang milik Daerah;
  - p. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan kepegawaian, budaya kerja, disiplin aparatur dan kinerja aparatur;
  - q. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
  - r. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
  - s. mempersiapkan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai
  - t. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
  - u. mengoordinir peran tim penilai angka kredit dalam pelaksanaan penilaian angka kredit;
  - v. mengoordinir pembinaan/penguatan kapasitas tenaga fungsional yang dimiliki Dinas;
  - w. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - x. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
  - b. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
  - c. melakukan pembinaan dan penatausahaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah;
  - e. melakukan verifikasi atas kelengkapan administrasi surat permintaan pembayaran;
  - f. melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan pajak dan retribusi;
  - g. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
  - h. mengoordinir dan meneliti anggaran;
  - i. menyusun laporan keuangan;
  - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - k. dan melaksanakan lainnya yang tugas pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya
3. Substansi Program, mempunyai tugas:



- a. melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan perencanaan perangkat daerah yang meliputi:
  1. rencana strategis;
  2. rencana kinerja tahunan;
  3. rencana aksi;
  4. penetapan kinerja;
  5. penetapan indikator kinerja; dan
  6. perjanjian kinerja;
- b. melaksanakan penyusunan perjanjian kinerja dan rencana kinerja tahunan;
- c. mengoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. menyusun bahan evaluasi rencana strategis dan evaluasi rencana kerja;
- e. melaksanakan pengelolaan, penginputan dan pelaporan data perencanaan dan data kinerja;
- f. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- g. melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
- h. mengoordinasikan pembangunan, pengembangan pemeliharaan aplikasi dengan bidang;
- i. melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas bidang;
- j. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- k. mengelola informasi dan dokumentasi serta pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;
- l. memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
- m. menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- n. memfasilitasi pembinaan tata kelola pelayanan publik;
- o. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya

### **3. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan**

Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, program perlindungan perempuan dan program peningkatan kualitas keluarga, program pengelolaan sistem data gender dan anak serta pemberdayaan masyarakat

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta urusan pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kegiatan pada program pengarusutamaan gender dan

pemberdayaan perempuan, program perlindungan perempuan dan program peningkatan kualitas keluarga, dan program pengelolaan sistem data gender dan anak;

- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan kegiatan pada program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, program perlindungan perempuan dan program peningkatan kualitas keluarga, dan program pengelolaan sistem data gender dan anak;
- d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pada kegiatan pada program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, program perlindungan perempuan dan program peningkatan kualitas keluarga, dan program pengelolaan sistem data gender dan anak;
- e. penyusunan dokumen perencanaan pada program dan kegiatan yang terkait program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, program perlindungan perempuan dan program peningkatan kualitas keluarga, dan program pengelolaan sistem data gender dan anak
- f. pelaksanaan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- g. pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- h. pengoordinasian layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Daerah;
- i. pengoordinasian layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Daerah;
- j. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan daerah;
- k. pelaksanaan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- l. pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- m. pelaksanaan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- n. pelaksanaan kegiatan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- o. pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data;
- p. pelaksanaan kegiatan pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah;
- q. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
- r. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kegiatan pada program administrasi pemerintahan desa, serta program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
- s. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan program administrasi pemerintahan desa, serta program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;

- t. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pada program administrasi pemerintahan desa, serta program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
  - u. penyusunan dokumen perencanaan pada Dinas terkait program administrasi pemerintahan desa, serta program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
  - v. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan;
  - w. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa/kelurahan dan lembaga adat tingkat daerah serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah;
  - x. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  - y. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
1. Substansi Perlindungan Perempuan, mempunyai tugas:
    - a) menyusun kegiatan dan sub kegiatan pada Substansi Perlindungan Perempuan;
    - b) melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan sub kegiatan yang terkait kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
    - c) melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan sub kegiatan yang terkait kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
    - d) melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam pelaksanaan sub kegiatan pada kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
    - e) menyusun usulan perencanaan dinas pada pelaksanaan sub kegiatan pada kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
    - f) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan;
    - g) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan;
    - h) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan;
    - i) melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan;
    - j) melaksanakan penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus;
    - k) melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;

- l) melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa;
  - m) melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pada program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
  - n) menyusun usulan perencanaan pada dokumen perencanaan Dinas pada kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat Daerah serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah;
  - o) melaksanakan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pada kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat Daerah serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah;
  - p) melaksanakan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
  - q) melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
  - r) melaksanakan fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat;
  - s) melaksanakan peningkatan peran kelompok kerja operasional pembinaan pos pelayanan terpadu;
  - t) melaksanakan fasilitasi peran para pihak dalam pemberdayaan masyarakat;
  - u) melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - v) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Substansi Peningkatan Kualitas Keluarga, mempunyai tugas:
- a) menyusun kegiatan dan sub kegiatan pada Substansi Peningkatan Kualitas Keluarga serta urusan fasilitasi peran tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
  - b) melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada sub urusan kualitas keluarga;
  - c) melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pada upaya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak, penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
  - d) melaksanakan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pada upaya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam

mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak, penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;

- e) menyusun usulan perencanaan sub kegiatan pada kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak, penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- f) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak;
- g) melaksanakan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kesetaraan gender dan perlindungan anak bagi keluarga;
- h) melaksanakan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga;
- i) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
- j) melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
- k) melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
- l) melaksanakan pelaksanaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak;
- m) melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan fasilitasi peran tim penggerak kesejahteraan keluarga dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
- n) melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan fasilitasi peran tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- o) melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan terkait fasilitasi peran tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
- p) menyusun usulan perencanaan pada dokumen perencanaan kegiatan fasilitasi peran tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
- q) melaksanakan fasilitasi peran tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Daerah dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
- r) melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3. Substansi Pembinaan Kualitas Hidup Perempuan, mempunyai tugas:

- a) menyusun kegiatan dan sub kegiatan pada Substansi Pembinaan Kualitas Hidup Perempuan serta urusan pembinaan profil kelurahan dan teknologi tepat guna;
- b) melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan sub kegiatan yang terkait kegiatan pelebagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data;
- c) melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan sub kegiatan yang terkait pelebagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data;
- d) melaksanakan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam pelaksanaan sub kegiatan pada kegiatan pelebagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data;
- e) menyusun usulan perencanaan sub kegiatan pada kegiatan pelebagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data
- f) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- g) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- h) melaksanakan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- i) melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan;
- j) melaksanakan penyediaan data gender dan anak;
- k) melaksanakan penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam pelebagaan data;
- l) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- m) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender;

- n) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan pembangunan yang responsif gender;
- o) melaksanakan sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan pembangunan yang responsif gender;
- p) melaksanakan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- q) menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kegiatan pada urusan pembinaan profil Kelurahan dan teknologi tepat guna;
- r) melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah;
- s) melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan pada pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat serta.
- t) pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah; menyusun usulan perencanaan pada dokumen perencanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah;
- u) melaksanakan fasilitasi penyusunan profil desa/kelurahan;
- v) melaksanakan fasilitasi evaluasi perkembangan desa/ kelurahan serta lomba desa/kelurahan;
- w) melaksanakan fasilitasi pemerintah desa/kelurahan dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;
- x) melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- y) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya

#### **4. Kepala Bidang Perlindungan Anak, berfungsi:**

Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perlindungan Anak.

Bidang Perlindungan Anak melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan pada Bidang Perlindungan Anak;

- b. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak;
  - c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pada program pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
  - d. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pada program pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
  - e. penyusunan usulan perencanaan dokumen perencanaan Dinas pada program pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
  - f. pelaksanaan kegiatan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
  - g. pelaksanaan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
  - h. pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak;
  - i. pelaksanaan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - j. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data profil anak serta data kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan baik perempuan dewasa maupun perempuan anak;
  - k. pengoordinasian layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah;
  - l. pengoordinasian layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah;
  - m. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah;
  - n. pengoordinasian pelaksanaan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Daerah;
  - o. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah;
  - p. pengoordinasian dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah;
  - q. pengoordinasian dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah;
  - r. pengoordinasian, sinkronisasi dan pelaksanaan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Daerah;
  - s. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  - t. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. Substansi Perlindungan Khusus Anak, mempunyai tugas:



- a. menyusun kegiatan dan sub kegiatan pada Substansi Perlindungan Khusus Anak
  - b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan program pemenuhan hak anak khususnya pada kegiatan penguatan dan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - c. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan program pemenuhan hak anak khususnya pada kegiatan penguatan dan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - d. menyusun usulan perencanaan pada program pemenuhan hak anak khususnya pada pelaksanaan kegiatan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak;
  - e. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah nonpemerintah, media dan dunia usaha;
  - f. melaksanakan, koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak;
  - g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data profil anak serta data kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan;
  - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
2. Substansi Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak, mempunyai tugas:
- a. menyusun kegiatan dan sub kegiatan Substansi Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak
  - b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
  - c. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam program pemenuhan hak anak khususnya dalam pelaksanaan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
  - d. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan program pemenuhan hak anak khususnya dalam pelaksanaan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;

- e. menyusun usulan perencanaan Dinas pada program pemenuhan hak anak khususnya dalam kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
  - f. melaksanakan penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak;
  - g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak;
  - h. melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
  - i. melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
  - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Substansi Pengolahan Data dan Penguatan Peran Gugus Tugas, mempunyai tugas:
- a) menyusun kegiatan dan sub kegiatan pada Substansi Pengolahan Data dan Penguatan Peran Gugus Tugas;
  - b) melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak serta kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - c) melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - d) melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak serta kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - e) menyusun usulan perencanaan Dinas pada kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak serta kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - f) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak;
  - g) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak;
  - h) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - i) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus;

- j) melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

##### **5. Kepala Bidang Keluarga Berencana**

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Keluarga Berencana.

Bidang Keluarga Berencana melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Keluarga Berencana;
- b. perumusan kebijakan teknis Daerah pada program pengendalian penduduk dan pembinaan keluarga berencana;
- c. pengusulan perencanaan pada dokumen perencanaan Dinas pada program pengendalian penduduk dan pembinaan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pada bidang pengendalian penduduk dan pembinaan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis pada program yang terkait program pengendalian penduduk dan pembinaan keluarga berencana;
- f. pelaksanaan kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- g. pelaksanaan kegiatan pemetaan prakiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah;
- h. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
- i. pelaksanaan kegiatan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana /petugas lapangan keluarga berencana;
- j. pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- k. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **1. Substansi Penyuluhan dan Penggerakan Berkeluarga Berencana, mempunyai tugas:**

- a) menyusun kegiatan dan sub kegiatan pada Substansi Penyuluhan dan Penggerakan Berkeluarga Berencana;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah pada kegiatan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- c) menyusun usulan perencanaan pada dokumen perencanaan Dinas pada kegiatan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;

- d) melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pada kegiatan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- e) melaksanakan kebijakan teknis pada kegiatan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- f) melaksanakan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan keluarga berencana ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;
- g) melaksanakan peningkatan kompetensi pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan keluarga berencana;
- h) melaksanakan peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang;
- i) melaksanakan penyediaan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang;
- j) melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan keluarga berencana;
- k) melaksanakan penyediaan sarana penunjang pelayanan keluarga berencana;
- l) melaksanakan pembinaan pascapelayanan bagi peserta keluarga berencana;
- m) melaksanakan pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;
- n) melaksanakan promosi dan konseling kesehatan reproduksi, serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan;
- o) melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- p) melaksanakan dukungan operasional pelayanan keluarga berencana bergerak;
- q) melaksanakan promosi dan konseling keluarga berencana pascapersalinan dan pascakeguguran;
- r) melaksanakan peningkatan kesertaan keluarga berencana pria;
- s) melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- t) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2. Substansi Jaminan Kualitas Layanan Keluarga Berencana, mempunyai tugas:

- a. menyusun kegiatan dan sub kegiatan pada Substansi Jaminan Kualitas Layanan Keluarga Berencana;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Daerah pada kegiatan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai

- kearifan budaya lokal dan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana;
- c. menyusun usulan perencanaan pada dokumen perencanaan Dinas pada kegiatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal dan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana;
  - d. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pada kegiatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal, pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana, serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber- keluarga berencana;
  - e. melaksanakan advokasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga kepada stakeholders dan mitra kerja;
  - f. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga sesuai kearifan budaya lokal;
  - g. melaksanakan penyediaan dan distribusi sarana komunikasi, informasi dan edukasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga
  - h. melaksanakan promosi dan komunikasi, informasi dan edukasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang;
  - i. melaksanakan penggunaan media massa cetak, elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budaya lokal dalam pencitraan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  - j. melaksanakan pelaksanaan mekanisme operasional program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui rapat koordinasi kecamatan, rapat koordinasi desa, dan mini lokakarya;
  - k. melaksanakan pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  - l. melaksanakan pengendalian program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  - m. melaksanakan pembinaan institusi masyarakat pedesaan dan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di lini lapangan oleh penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana;
  - n. melaksanakan penyediaan sarana pendukung operasional penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana;
  - o. melaksanakan penguatan penggerakan, pelayanan pelaksanaan penyuluhan, dan pengembangan program kependudukan,

keluarga berencana dan pembangunan keluarga untuk penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana;

- p. melaksanakan penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan
  - q. melaksanakan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana;
  - r. melaksanakan integrasi pembangunan lintas sektor di kampung keluarga berencana;
  - s. melaksanakan pelaksanaan dan pengelolaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di kampung keluarga berencana;
  - t. melaksanakan berencana;
  - u. pembinaan terpadu kampung keluarga melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - v. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Substansi Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga, mempunyai tugas:
- a. menyusun program dan kegiatan pada Substansi Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga;
  - b. merumuskan kebijakan teknis Daerah yang terkait Substansi Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga;
  - c. menyusun usulan perencanaan pada dokumen perencanaan Dinas pada kegiatan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah serta pemetaan prakiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah;
  - d. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pada program pengendalian penduduk;
  - e. melaksanakan penyerasian kebijakan pembangunan Daerah terhadap kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  - f. melaksanakan penyusunan dan pemanfaatan grand design pembangunan kependudukan;
  - g. melaksanakan pelaksanaan survei/pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan;
  - h. melaksanakan pelaksanaan survei/pendataan indeks pengetahuan masyarakat tentang kependudukan;
  - i. melaksanakan penguatan kerja sama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal;
  - j. melaksanakan penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan non formal;
  - k. melaksanakan penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal Daerah;
  - l. melaksanakan penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan nonformal sesuai isu lokal Daerah

- m. melaksanakan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang sekolah dasar/madrasah ibtidaiah dan sekolah menengah pertama/madrasah sanawiah, jalur nonformal dan informal;
- n. melaksanakan implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan nonformal;
- o. melaksanakan implementasi pendidikan kependudukan jalur informal di kelompok kegiatan masyarakat binaan;
- p. melaksanakan advokasi ten tang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan;
- q. melaksanakan sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan;
- r. melaksanakan sarasehan hasil pemutahiran data keluarga;
- s. melaksanakan rapat pengendalian program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- t. melaksanakan perumusan parameter kependudukan;
- u. melaksanakan penyediaan dan pengolahan data kependudukan;
- v. melaksanakan penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- w. melaksanakan pemetaan kependudukan;
- x. melaksanakan penyusunan kajian dampak kependudukan;
- y. melaksanakan pengembangan model pengendalian dampak kependudukan;
- z. solusi melaksanakan pengukuran dan perhitungan kerentanan dampak kependudukan (early strategis indikator warning system/peringatan dini);
- aa. membentuk rumah data kependudukan di kampung keluarga berencana untuk memperkuat integrasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di sektor lain;
- bb. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga;
- cc. melaksanakan pemanfaatan data hasil pemutahiran data keluarga;
- dd. melaksanakan penyediaan data dan informasi keluarga;
- ee. melaksanakan pencatatan dan pengumpulan data keluarga;
- ff. melaksanakan pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB
- gg. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- hh. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- ii. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. **Kepala Bidang Ketahanan Keluarga** mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Ketahanan Keluarga.

Bidang Ketahanan Keluarga melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Ketahanan Keluarga;
- b. penyusunan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketahanan keluarga;
- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
- d. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
- e. penyusunan usulan perencanaan pada dokumen perencanaan Dinas pada program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
- f. pelaksanaan kegiatan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- g. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. pelaksanaan penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Substansi Bina Ketahanan Keluarga dan Pendayagunaan Kelompok Kegiatan, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Substansi Bina Ketahanan Keluarga dan Pendayagunaan Kelompok Kegiatan;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pada Substansi Bina Ketahanan Keluarga dan Pendayagunaan Kelompok Kegiatan;
- c. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pada pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembentukan serta peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. melaksanakan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
- e. menyusun usulan perencanaan pada dokumen perencanaan kegiatan pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- f. melaksanakan pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, Bina Keluarga Lansia, Unit Peningkatan Pendapatan Sejahtera/Pemberdayaan Ekonomi Keluarga);
- g. melaksanakan pengadaan sarana Keluarga Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina



Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, Bina Keluarga Lansia, Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera/Pemberdayaan Ekonomi Keluarga);

- h. melaksanakan penyediaan biaya operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, Bina Keluarga Lansia, Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera/Pemberdayaan Ekonomi Keluarga);
  - i. melaksanakan penyediaan biaya operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, Bina Keluarga Lansia, Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera/Pemberdayaan Ekonomi Keluarga);
  - j. melaksanakan penguatan kebijakan Daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - k. melaksanakan pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - l. melaksanakan peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Substansi Penggerakan Partisipasi Remaja, mempunyai tugas:
- a. menyusun program dan kegiatan Substansi Penggerakan Partisipasi Remaja;
  - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan Substansi Penggerakan Partisipasi Remaja dan urusan Promosi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - c. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pada program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
  - d. melaksanakan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
  - e. menyusun usulan perencanaan pada dokumen perencanaan kegiatan promosi ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - f. melaksanakan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, Bina Keluarga Lansia, Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera/Pemberdayaan Ekonomi Keluarga);
  - g. melaksanakan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua

- hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga);
  - h. melaksanakan penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya indeks pembangunan keluarga;
  - i. melaksanakan penyediaan dan pengembangan materi indeks pembangunan keluarga
  - j. melaksanakan advokasi dan promosi indeks pembangunan keluarga;
  - k. melaksanakan sosialisasi indeks pembangunan keluarga;
  - l. melaksanakan pelaksanaan koordinasi evaluasi pencapaian indeks pembangunan keluarga;
  - m. melaksanakan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja;
  - n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugas
3. Substansi Ketahanan Ekonomi Keluarga, mempunyai tugas;
- a. menyusun program dan kegiatan Substansi Ketahanan Ekonomi Keluarga;
  - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan Substansi Ketahanan Ekonomi Keluarga dan urusan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - c. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pada pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; menyusun usulan perencanaan pada dokumen perencanaan kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - d. melaksanakan orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (bina keluarga balita, bina keluarga remaja, pusat informasi dan konseling remaja, bina keluarga lansia, unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera/pemberdayaan ekonomi keluarga);
  - e. melaksanakan orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (bina keluarga balita, bina keluarga remaja, pusat informasi dan konseling remaja, bina keluarga lansia, unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera/pemberdayaan ekonomi keluarga);
  - f. melaksanakan penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas;
  - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **7. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak**

### **A. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, bertugas:**

- 1. Menyelenggarakan tugas dan fungsi layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan klien, pengelolaan kasus,

penampungan sementara, mediasi, pendampingan terhadap klien yang mengalami kekerasan melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi kantor UPTD;

2. Mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

**B. Kasubag TU UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, bertugas :**

1. Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program;
2. Keuangan;
3. Ketatausahaan;
4. Rumah tangga;
5. Perlengkapan;
6. Kepegawaian dan kehumasan; dan
7. Pengelolaan barang milik Daerah yang menjadi kewenangan UPTD.

**b. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Sumber daya manusia merupakan salah satu hal yang mendasar dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Balikpapan. Tanpa adanya SDM yang berkualitas, maka akan terjadi ketimpangan dan ketidak-seimbangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan memiliki tenaga PNS maupun Non PNS termasuk Penyuluh KB yang merupakan PNS Pemerintah Pusat namun ditempatkan di Kota Balikpapan untuk mendukung kinerja pusat dan daerah dalam pengelolaan urusan yang menjadi kewenangan Pemda melalui peran OPD yakni urusan pemerintah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Namun, meskipun PKB adalah PNS Pemerintah Pusat/ BKKBN tetapi dalam penyusunan RENSTRA ini ketenagaan PKB kami perhitungkan sebagai SDM yang mendukung kinerja DP3AKB, mengingat dalam lampiran “N” Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait kewenangan Pemerintah Daerah Kab/ Kota dalam menjalankan urusan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyebutkan tentang kewenangan Pemda adalah pendayagunaan Penyuluh KB sedangkan Pemerintah Pusat kewenangannya adalah pengelolaan PKB.

Berdasarkan uraian di atas, maka jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan Tahun 2025 untuk mendukung kinerja 3 (tiga) urusan yang menjadi kewenangan daerah adalah sebanyak 77 (Tujuh puluh tujuh) orang terdiri dari 9 pejabat struktural di Kantor DP3AKB, 7 orang Pejabat Fungsional, 17 staf pelaksana PNS, 26 staf pelaksana non PNS di Kantor DP3AKB, dan 18 penyuluh KB (PNS dari Pemerintah Pusat yang ditempatkan di Kota Balikpapan untuk dukung kinerja urusan PP dan KB di Kota Balikpapan).



Tabel 2.1. Pegawai DP3AKB Kota Balikpapan  
Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan, Pendidikan serta Jabatan  
Tahun 2024

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				PPPK	Non PNS	Pendidikan					
			PNS						Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
	L	P	IV	III	II	I								
Kepala Dinas	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Sekretaris Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepala Bidang	1	3	3	1	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
Kepala UPTD	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Kasubag	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Kasubag TU	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Jabatan Fungsional Tertentu	-	7	-	7	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-
Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana	5	12	-	11	6	-	-	-	1	9	2	5	-	-
Staf non PNS	6	20	-	-	-	-	-	26	2	9	1	11	2	1
Penyuluh KB (Pegawai Pusat)	-	18	5	6	7	-	-	-	1	7	9	1	-	-
Total	12	65	10	28	13	0	0	26	6	39	12	17	2	1
Jumlah Total Pegawai			51				-	26	77					
Total Seluruh Pegawai			77						77					

Sumber Data: DP3AKB Kota Balikpapan Tahun 2024

Tabel 2.2. Sarana dan Prasarana Kerja DP3AKB Kota Balikpapan  
per 31 Desember 2024

No	Uraian	Satuan	Banyak	Kondisi (B, RR, RB)	Pemegang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
I	MEUBELAIR Papan Nama Instansi	Buah	11	Baik		- 3 Papan Nama PUSPAGA (unit I, II dan II) - Papan Nama DP3AKB, Balai Penyuluh dan Sekretariat Forum Anak - Papan nama UPTD PPA, papan nama RIRA (4)
	Papan Pengumuman	Buah	1	Baik		- Papan Pengumuman Sekretariat dan PUSPAGA
	Papan Struktur Organisasi	Buah	1	Baik		Di Sekretariat
	Whiteboard	Buah	2	Baik		Di Ruang Rapat I dan II
	Kursi kerja Pejabat Eselon 2	Buah	1	Baik	Kepala Dinas	
	Kursi Rapat	Buah	109	Baik		Kursi Rapat di Ruang Rapat I , Ruang Rapat II dan Balai Penyuluh
	Kursi Putar	Buah	3	Baik (1) rusak berat (2)	Pejabat Eselon IV di Sekretariat	
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	9		Pejabat Fungsional di Bidang-Bidang (7)	Pejabat Eselon IV di UPTD (2)
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Buah	16		Para Pelaksana di DP3AKB	
	Sofa	Buah	1	Baik	Sekretaris	Sofa di ruang Sekretaris
	Meja Komputer	Buah	3	Rusak Ringan	Staf Sekretariat, Bidang KB dan Bidang PPP	
	Meja Kerja Pejabat Eselon 3	Buah	5	Baik	Pejabat Eselon III	
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Buah	20	Baik (18), Rusak Berat (2)	Staf PNS dan Non PNS	
	Meja Bundar	Buah	1	Baik		Meja Rapat di Ruang Sekretariat Forum Anak

No	Uraian	Satuan	Banyak	Kondisi (B, RR, RB)	Pemegang	Keterangan
	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Buah	19	Baik (9), Rusak Ringan (10)	Pejabat Fungsional	
	Meja Lipat	Buah	4	Baik	PUSPAGA	
	Meja Rapat	Buah	3	Baik	Ruang Rapat II dan UPTD PPA	
	Lemari Kayu	Buah	3	Baik	UPTD PPA	Lemari Kayu di Rulin
	Lemari Besi	Buah	20	Baik	- 3 Unit di Sekretariat - 13 Unit di Bidang-bidang - 4 unit di UPTD	
	Rak Besi / Metal	Buah	2	Baik		Sekretariat
	Filling Besi / Metal	Buah	14	Baik	- 2 Unit di Sekretariat - 10 Unit di Bidang-bidang - 2 unit di UPTD	Filing Cabinet
	Lemari Kaca	Buah	2	Baik		Sekretariat
	Buffet Kayu	Buah	1	Baik		Sekretariat
	Buffet Kaca	Buah	2	Baik		Sekretariat
	Kelompok Penyimpan / Laci	Buah	14	Baik	- 6 Unit di Sekretariat - 8 Unit di Bidang-bidang	
	Back Wall	Buah	2	Baik	Bidang KK	
	Light Box / Frame	Buah	4	Baik	Bidang KK	
	Scrolling Banner	Buah	2	Baik	Bidang KK	
	Tower Rotary Light Box Folded Panel			Baik		Untuk keperluan pameran di simpan di Gudang Arsip Lantai 4
	Kursi Lipat	Buah	2	Baik	PUSPAGA	
	Tenda	Buah	1	Baik	Bidang PPP	
II	PERALATAN DAN MESIN					
	Personal Computer				17 Unit di sekretariat, 8 unit di Bidang KK, 8 unit di bidang KB, 8 unit di bidang PA, 8 unit di bidang PPP dan Balai Penyuluh KB	
	Laptop	unit	40	- 20 unit baik  - 10 unit RR	- 17 Unit dipegang oleh PKB - 5 unit di sekretariat	
				- 10 unit RB	- 8 unit di seluruh bidang - 10 unit RB	

No	Uraian	Satuan	Banyak	Kondisi (B, RR, RB)	Pemegang	Keterangan
	Printer	Unit	48	- 25 unit Baik - 15 unit RR - 8 unit RB	- 14 unit di sekretariat - 8 unit di bidang KK - 8 unit di bidang KB - 8 unit di bidang PA - 8 unit di bidang PPP - Balai Penyuluh KB	
	AC Unit	Unit	19	- 15 unit baik - 4 unit RR	DP3AKB, Balai Penyuluh, PUSPAGA, Gudang Alokon	
	Televisi/ Smart TV	Unit	5	- 4 unit baik - 1 unit RR	Sekretariat	
	Sound System	Unit	5	- 3 unit baik - 2 unit RR	Sekretariat	
	Compac Diss Player	Unit	1	Baik	Sekretariat	
	Wireless Amplifier	Unit	1	Baik	Sekretariat	
	Microphone	Unit	1	Baik	Sekretariat	
	Kabel Listrik	Unit	4	Baik	Sekretariat	
	Facsimile	Unit	1	Baik	Sekretariat	
	Portable Generating Set	Unit	1	Rusak Berat	Sekretariat	
	Mesin Ketik Listrik Portable	Unit	1	Baik	Sekretariat	
	Mesin Absensi	Unit	1	Baik	Sekretariat	
	Camera	Unit	3	Baik		
	LCD/Infocus Proyektor + attachment Tripod	Unit	4	Baik	Sekretariat Bidang KB Bidang PPP	
					Bidang PA	
	Screen/layar	Unit	1	Baik	Bidang KB	
	Scanner	Unit	9	Baik	Sekretariat	
	CCTV	Unit	2	Baik	Sekretariat	
III	KENDARAAN BERMOTOR					
	Mobil	Unit	6	Baik		operasional
	Motor	Unit	50	- 33 unit Baik  - 17 Unit RR	- 21 unit Esselon IV/Pejabat Fungsional  - 27 Unit Penyuluh KB - 2 unit UPTD PPA	
IV	PERALATAN PUSPAGA					



No	Uraian	Satuan	Banyak	Kondisi (B, RR, RB)	Pemegang	Keterangan
	PC, TV LCD, LAPTOP dan TAS, LC Proyektor, Printer	Unit	Masing-masing 1 unit	Baik	Psikolog PUSPAGA	
	Alat kedokteran Jiwa dll	Set	1	Baik	Psikolog PUSPAGA	
V	<b>PERALATAN BALAI PENYULUHAN KB</b>					
	Genset	Unit	1	Baik	kabid KB	
	AC	Unit	3	Baik	kabid KB	
	Kursi Rapat	buah	75	Baik	kabid KB	
	Meja Rapat	buah	1	Baik	kabid KB	
	Speaker	unit	1	Baik	kabid KB	
	HP ANDROID bagi para PKB untuk menjalankan fungsinya	unit	33	- 16 unit Baik - 17 Unit RB	Penyuluh KB	
VI	<b>PERALATAN UPTD PPA</b>					
	Personal Computer	Unit	9	- 7 unit Baik, 2 unit RR	UPTD PPA	
	Printer	Unit	8	Baik		
	Laptop	Unit	4	Baik	UPTD PPA	
	Infocus	Unit	1	Baik	UPTD PPA	
	CCTV	Unit	1	Baik	UPTD PPA	
	Mesin Survey	Unit	1	Baik	UPTD PPA	
	Lemari Kabinet	Unit	3	Baik	UPTD PPA	
	Lemari Kayu	Unit	2	Baik	UPTD PPA	
	Lemari Kaca	buah	1	Baik	UPTD PPA	
	Sofa	buah	2	Baik	UPTD PPA	
	APE	set	2	Baik	UPTD PPA	
	Meja Rapat	buah	1	Baik	UPTD PPA	
	Tempat Tidur	Buah	4	Baik	UPTD PPA	
	Meja Makan	Buah	1	Baik	UPTD PPA	
	Kursi Kayu	Buah	6	Baik	UPTD PPA	
	Lemari Es	Unit	2	Baik	UPTD PPA	Di Rumah Perlindungan
	AC	Unit	5	Baik	UPTD PPA	
	<i>Sound System</i>	Unit	1	Baik	UPTD PPA	Di Rumah Perlindungan
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	buah	2	Baik	UPTD PPA	1 set di UPTD PPA 1 Set di Rumah Perlindungan
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	buah	2	Baik	UPTD PPA	Di Rumah Perlindungan
	Meja Kerja Non Struktural	buah	4	Baik	UPTD PPA	Di Rumah Perlindungan
	Kursi Kerja Non Struktural	buah	20	Baik	UPTD PPA	
	Kursi Rapat	buah	10	Baik	UPTD PPA	

No	Uraian	Satuan	Banyak	Kondisi (B, RR, RB)	Pemegang	Keterangan
	Mesin Cuci	Unit	1	Baik	UPTD PPA	
	Televisi	Unit	1	Baik	UPTD PPA	
	Handphone	Unit	2	1 unit Baik, 1 unit RB	UPTD PPA	
	Kursi Roda	buah	2	Baik	UPTD PPA	
	Kursi Pijat Refleksi	Unit	1	Baik	UPTD PPA	
	Gitar	Buah	1	Baik	UPTD PPA	
	Tenis Meja	Set	1	Baik	UPTD PPA	

Sumber Data: Pengurus Barang DP3AKB Tahun 2024

c. **Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan**

Gambaran mengenai pencapaian kinerja perangkat daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yakni Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus, cara merumuskan/ membaca IPG yaitu memperbandingkan IPM Perempuan dibagi IPM laki laki dikalikan 100 sedangkan cara membacanya dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100, artinya semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

Capaian IPG Kota Balikpapan pada tahun 2024 sebesar 90,34 menunjukkan data capaian yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian tingkat nasional yang berada pada nilai 91,85 serta menunjukkan data capaian yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian provinsi Kalimantan Timur sebesar 87.45 Capaian IPG Kota Balikpapan sejak tahun 2020-2024 menunjukkan trend meningkat meski tidak terlalu signifikan, namun secara umum selama kurun waktu tahun 2020-2024 pembangunan manusia berbasis gender di kota Balikpapan berada dalam kategori sangat tinggi (lebih dari 80) jika dilihat dari status pencapaian pembangunan manusia. Penurunan IPG pada suatu tahun menunjukkan adanya pertumbuhan capaian pembangunan perempuan yang lebih lambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan capaian pembangunan laki-laki, untuk mendeteksi penyebab perbedaan pertumbuhan IPM tersebut, ternyata komponen yang menunjukkan perbedaan pertumbuhan yang cukup signifikan diantaranya adalah pada komponen “pengeluaran per kapita”.

Selain IPG, maka indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Capaian IDG kota Balikpapan sejak tahun 2020-2024 menunjukkan trend meningkat meski tidak terlalu signifikan, capaian IDG kota Balikpapan masih lebih tinggi kinerjanya apabila dibandingkan dengan capaian di tingkat provinsi Kaltim dan lebih rendah apabila dipersandingkan kinerjanya

dengan IDG di tingkat nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati pada tabel 2.3 Capaian IPG dan IDG dalam kurun waktu periode tahun 2020-2024 di bawah ini.

Tabel 2.3. Capaian IPG dan IDG Periode 2020-2024

Tahun	IPG			IDG		
	Balikpapan	Prov. Kaltim	Nasional	Balikpapan	Prov. Kaltim	Nasional
2020	89,65	85,70	91,06	68,97	65,54	75,57
2021	89,83	85,95	91,27	68,62	66,64	76,26
2022	89,96	86,61	91,63	69,27	66,89	76,59
2023	90,13	87,13	91,85	72,00	68,96	76,90
2024	90,34	87,45	91,85	75,04	61,41	77,62

Apabila memperhatikan capaian kinerja terhadap indikator SDG’s terkait dengan permasalahan kesetaraan dan keadilan gender dapat disampaikan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.4. Capaian kinerja kesetaraan dan keadilan gender

No Indikator	Indikator	Capaian Tahun						Target (Perpres 59/ 2017)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	32	35	25	28	32	38	Meningkat
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	20	20	10	10	10	12	Meningkat
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	0,0029	0,0029	22,2	22,2	22,2	26,7	Meningkat
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II).	0,22	0,22	28	42,9	34,375	35,48	Meningkat

2. Perlindungan Perempuan dan Anak

Upaya perlindungan perempuan di kota Balikpapan dilakukan dengan sasaran perempuan baik perempuan anak maupun perempuan dewasa, sehingga upaya perlindungan perempuan tidak bisa dipisahkan dengan segala upaya yang dilakukan dengan tujuan perlindungan anak pula. Upaya yang sudah dilakukan antara lain meliputi sosialisasi UU PKDRT, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang,

pelibatan peran serta masyarakat sejak tahun 2024 sampai saat ini dalam mendukung perlindungan perempuan dan anak melalui sebuah sistim kelembagaan di tingkat RT yang ada di kota Balikpapan yakni adanya Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak (Seksi PPA) di tingkat RT yang mana ini capaiannya adalah 100% RT (1.784 RT dari 1.784 RT di kota Balikpapan sudah memiliki Seksi PPA tingkat RT), termasuk penyediaan layanan perempuan dan anak korban kekerasan pada awal tahun 2019 berupa UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang mana ini menjalankan amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang PEMDA khususnya kewenangan Pemda dalam penyediaan layanan perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Pada tahun 2024, rasio kekerasan terhadap perempuan sebesar 0,038 dari 100.000 penduduk perempuan.

Upaya perlindungan Anak di kota Balikpapan dilakukan dengan melakukan penyuluhan ke masyarakat dan kelembagaan terkait regulasi perlindungan anak, ada kegiatan penguatan pola pengasuhan yang menyasar keluarga keluarga di level RT (LAUTAN RT = poLA pengUaTan pengasuhAN keluarga dari RT ke RT), pembentukan Forum PPATBM (Forum Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di tingkat kelurahan sudah mencapai 100% (34 Kelurahan dari 34 Kelurahan yang ada di kota Balikpapan sudah membentuk Forum PPATBM), penguatan kualitas penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak seperti meningkatnya jumlah sekolah ramah anak (795 SRA pada tahun 2024), jumlah Pelayanan Ramah Anak pada Puskesmas (27 PRAP pada tahun 2024), pembentukan APSAI (Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia) Cabang Kota Balikpapan, bersinergi dengan Dinas Sosial dalam bentuk fasilitasi peran kelembagaan masyarakat melalui dorongan dalam pembentukan lembaga LPKS di kota Balikpapan sejak tahun 2019 yang dikelola oleh kelembagaan masyarakat peduli anak sebagai sebuah upaya untuk memenuhi amanat UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang juga sudah mendapatkan pengesahan dari Menteri Sosial RI pada tahun 2019, fasilitasi upaya pemenuhan hak anak khususnya hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai korban maupun pelaku termasuk upaya untuk menyuarakan hak hak anak melalui peran Forum Anak yang sudah dibentuk sebanyak 41 Forum Anak (tingkat kota, kecamatan dan kelurahan).

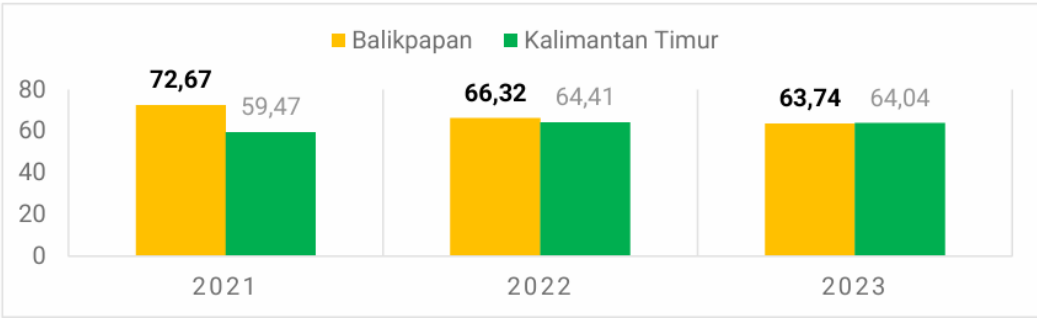
Peningkatan kualitas keluarga yang sudah dilakukan sampai dengan tahun 2024 meliputi pengembangan lokasi layanan konseling keluarga dalam bentuk lokasi layanan PUSPAGA (**PUS**at **Pembel**Ajaran keluar**GA**) sebanyak 8 lokasi layanan sampai tahun 2024, cakupan jumlah kelompok BKB terbentuk (86%), cakupan jumlah kelompok BKR terbentuk (44%), cakupan jumlah kelompok BKL terbentuk (69%), cakupan jumlah kelompok PIK Remaja terbentuk (120%), juga pembinaan kelompok UPPKA/ Industri Rumahan sebagai sebuah upaya pemberdayaan ekonomi keluarga sudah tercapai 100%. Apabila memperhatikan capaian kinerja terhadap indikator SDG's terkait dengan permasalahan perlindungan perempuan dan anak dapat disampaikan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.5. Capaian Kinerja Perlindungan Perempuan dan Anak

No Indikator	Indikator	Capaian Tahun						Target (Perpres 59/ 2017)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. (Jumlah anak perempuan korban kekerasan dibagi jumlah anak perempuan dikali 100)	4,76%	2,64%	0,023	0,05	0,09	0,034	Menurun
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. (Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif adalah kasus Kekerasan Fisik dan Kekerasan Seksual dibagi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dikali 100)	89,87	84,09	100	100,00	100,00	100	Meningkat
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. (Jumlah anak laki-laki dan perempuan yang mendapatkan kekerasan dibagi jumlah anak dikali 100)	2,88%	1,53%	0,026%	0,025%	0,061%	0,078%	Menurun

2.1. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks perlindungan anak (IPA) merupakan indikator untuk mengukur capaian perlindungan anak di Indonesia agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indeks perlindungan anak (IPA) diukur dari 5 kluster dan 27 indikator. Kluster 1 hingga kluster 4 mengacu pada 4 kluster pemenuhan hak anak sebagai pembentuk indeks pemenuhan hak anak (IPHA). Kluster 5 membentuk indeks perlindungan khusus anak (IPKA). Sedangkan gabungan dari kluster 1 hingga kluster 5 membentuk indeks perlindungan anak (IPA). Nilai IPA berkisar 0-100 dan bermakna positif. Semakin tinggi nilai IPA, maka semakin baik upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Berikut capaian IPA Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 2. 3 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023

Sumber: Laporan Indeks Perlindungan Anak (IPA) Tahun 2021-2023, KemenPPPA dengan BPS

3. Pembinaan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk

Pembinaan terkait program KB dan juga program pengendalian penduduk sudah dilakukan dengan melakukan sinergi dengan peran kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim dan BKKBN RI, termasuk juga kemitraan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan melalui peran Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan KB, dan Tim Penggerak PKK, serta para pihak lainnya.

Capaian kinerja tahun 2024 terkait pembinaan KB dapat disampaikan dimana angka CPR di kota Balikpapan mencapai 64,45 %, jumlah Sekolah Siaga Kependudukan 60 sekolah, jumlah Unmet Need 12,20 %, 34 Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), Cakupan kepesertaan KB MKJP 30,23%, dan jumlah tenaga kesehatan terlatih layanan KB (bidan terlatih CTU) sebanyak 30 orang bidan.

Apabila memperhatikan capaian kinerja terhadap indikator SDG's terkait dengan permasalahan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dapat disampaikan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.6. Capaian Kinerja Pembinaan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk

No Indikator	Indikator	Capaian Tahun						Target (Perpres 59/ 2017)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. <i>(Jumlah PUS dalam status kawin Peserta Aktif KB dibagi Jumlah PUS dalam status kawin dikali 100)</i>	70,02	70,61	70,3	58,21	61,02	64,45	Meningkat
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern <i>(Jumlah PUS dalam status kawin peserta KB aktif MKJP dibagi jumlah PUS Peserta KB Aktif dikali 100)</i>	27,99	26,29	27,01	31,41	30,01	30,23	Meningkat
5.6.1.(b)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak	14,49	14,04	14,29	30,57	17,59	12,20	Menurun

No Indikator	Indikator	Capaian Tahun						Target (Perpres 59/ 2017)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	terpenuhi). <i>(Jumlah PUS dalam status kawin Kategori TIAL dan IAT dibagi Jumlah PUS dalam status kawin dikali 100)</i>							

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Balikpapan, maka perangkat daerah DP3AKB Kota Balikpapan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Balikpapan yang membidangi 3 (tiga) urusan wajib, yakni urusan Pengendalian Penduduk & KB dan Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak dan urusan Pemberdayaan Masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi DP3AKB Kota Balikpapan.

Dalam rangka memberikan gambaran capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya yakni periode tahun 2021-2026, maka capaian kinerja DP3AKB Kota Balikpapan tergambar atau dapat diamati dalam Tabel 2.4 di bawah ini, dimana yang dimaksud capaian kinerja selama periode sebelumnya adalah kinerja OPD berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam setiap rincian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RENSTRA DP3AKB periode sebelumnya yaitu untuk periode Tahun 2021-2026.

Indikator kinerja dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra SKPD DP3AKB Kota Balikpapan pada tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tertera pada Tabel 2.4 di bawah ini:

Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target rencana Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	IKU																		
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				69.27	69.4	70.5	73	75.24	69.27	72	75.04	0	0	100%	104%	106%	0	0
2	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevelence Rate/mCPR)				70.61	70.63	70.65	70.65	70.65	58.21	61.02	64.45	0	0	82%	86%	91%	0	0
3	Prosentase Keluruhan Kategori Berkembang				5.88	11.76	29.41	44.12	58.82	38.24	100	100	0	0	650%	850%	340%	0	0
4	Nilai AKIP DP3AKB				84.33	84.4	84.42	84.45	84.49	83.64	52.98	64.64	0	0	99%	63%	77%	0	0
	IKK																	0	0
1	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.				36	37	38	39	40	28	32	38	0	0	78%	86%	100%	0	0
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.				20	20	20	20	21	10	10	12	0	0	50%	50%	60%	0	0



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target rencana Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
3	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).				0.003	0.0031	0.0032	0.0033	0.0034	22.2	22.2	26.7	0	0	740000%	716129%	834375%	0	0
4	Persentase keterwakilan Perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II).				0.23	0.25	0.27	0.28	0.29	42.9	34	35.48	0	0	18652.2%	13750%	13140.7%	0	0
5	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. (Jumlah anak perempuan korban kekerasan dibagi jumlah anak perempuan dikali 100)				2.63	2.62	2.61	2.59	2.45	0.05	0.09	0.034	0	0	1.9%	3.4%	1.3%	0	0
6	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. (Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif adalah kasus Kekerasan Fisik dan Kekerasan Seksual dibagi jumlah kasus kekerasan				84.09	84.1	84.25	84.35	84.7	100	100	100	0	0	118.9%	118.9%	118.7%	0	0

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target rencana Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	terhadap perempuan dikali 100)																		
7	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. (Jumlah anak laki-laki dan perempuan yang mendapatkan kekerasan dibagi jumlah anak dikali 100)				1.52	1.51	1.5	1.48	1.35	0.025	0.061	0.078	0	0	1.6%	4.0%	5.2%	0	0
8	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. (Jumlah PUS dalam status kawin Peserta Aktif KB dibagi Jumlah PUS dalam status kawin dikali 100)				70.61	70.63	70.65	70.65	70.65	58.21	61.02	64.45	0	0	82.4%	86.4%	91.2%	0	0
9	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern (Jumlah PUS dalam status kawin peserta KB aktif MKJP dibagi jumlah PUS Peserta				26.5	26.75	27.5	27.75	28.75	31.41	30.01	30.23	0	0	118.5%	112.2%	109.9%	0	0

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target rencana Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	KB Aktif dikali 100)																		
10	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). (Jumlah PUS dalam status kawin Kategori TIAL dan IAT dibagi Jumlah PUS dalam status kawin dikali 100)				13.75	13.4	13.1	11.25	11.2	30.57	17.59	12.2	0	0	222.3%	131.3%	93.1%	0	0

**Tabel 2.8**  
**T-C. 24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana**  
**Kota Balikpapan**

NO.	URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DNA KELUARGA BERENCANA	4,117,465,300	15,910,060,794	27,793,017,610	31,207,769,000	38,462,234,005	1,557,441,215	13,087,538,040	20,919,361,862	27,727,314,967	4,924,358,198	37.83	82.26	75.27	88.85	90.80
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2,056,215,300	10,406,389,644	12,466,725,900	16,152,084,788	20,477,940,275	1,175,162,475	9,209,522,662	10,641,378,124	14,236,706,268	18,291,766,332	57.15	88.50	85.36	88.14	89.32
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,706,215,300	7,661,945,612	8,923,876,500	9,724,542,738	11,507,651,176	1,125,370,225	6,970,486,434	7,928,795,595	8,572,852,063	10,194,974,643	65.96	90.98	88.85	88.16	88.59
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	350,000,000	249,999,910	549,999,600	675,000,000	1,219,892,599	49,792,250	222,182,990	420,395,911.00	600,946,208	1,113,601,769	14.23	88.87	76.44	89.03	91.29
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	834,189,550	749,494,000	939,204,000	1,205,750,000	-	547,241,069	516,504,691	668,872,374	1,042,637,628		65.60	68.91	71.22	86.47
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	219,086,360	600,000,000	700,000,000	1,288,700,000	-	193,501,537	357,487,496	560,846,110	1,181,319,834		88.32	59.58	80.12	91.67
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	293,146,400	74,999,800	200,000,000	348,300,000	-	275,789,786	4,123,010.00	159,486,816	325,850,905		94.08	5.50	79.74	93.55
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	229,297,700	595,000,000	2,327,140,750	2,977,686,500	-	225,759,805	579,286,434	2,244,812,751	2,834,793,362		98.46	97.36	96.46	95.20
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	918,724,112	973,356,000	1,586,197,300	1,929,960,000	-	774,561,041	834,784,987	1,428,889,946	1,598,588,191		84.31	85.76	90.08	82.83

NO.	URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2,061,250,000	5,503,671,150	6,932,909,000	7,897,344,733	8,970,544,000	382,278,740	3,878,015,378	4,226,291,399	7,008,713,776	8,464,175,999	18.55	70.46	60.96	88.75	94.36
8	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	586,352,100	673,115,000	878,600,300	1,156,900,000	-	579,180,030	636,923,900	770,193,873	1,086,087,060		98.78	94.62	87.66	93.88
9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2,061,250,000	3,412,922,450	2,829,594,000	3,022,479,433	2,831,434,000	382,278,740	2,051,871,789	1,942,405,440	2,522,663,438	2,632,001,841	18.55	60.12	68.65	83.46	92.96
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	1,504,396,600	3,430,200,000	3,996,265,000	4,982,210,000	-	1,246,963,559	1,646,962,059	3,715,856,465	4,746,087,098		82.89	48.01	92.98	95.26
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	8,393,382,710	7,158,339,479	9,013,749,730	-	-	6,051,692,339	6,481,894,923	8,168,415,867		#DIV/0!	72.10	90.55	90.62
11	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-	672,334,160	589,289,479	686,990,000	-	-	233,930,413	474,291,442	392,039,878		#DIV/0!	34.79	80.49	57.07
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-	7,721,048,550	6,569,050,000	8,326,759,730	-	-	5,817,761,926	6,007,603,481	7,776,375,989		#DIV/0!	75.35	91.45	93.39

\*) Target kinerja tahun 2020 merupakan tahun transisi peralihan dari Renstra Tahun 2016-2021 dan 2021-2026 sehingga memiliki indikator kinerja yang berbeda.

**d. Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok sasaran layanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yaitu langsung kepada Masyarakat.

**e. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan**

Beberapa mitra pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) adalah sebagai berikut:

- a. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres, adalah mitra dalam hal penanganan kasus kekerasan
- b. Renakta Polda Kaltim  
Renakta merupakan singkatan dari Remaja, Anak, dan Wanita. Dalam konteks kepolisian, Renakta adalah sebuah subdirektorat yang menangani kasus-kasus yang melibatkan kelompok remaja, anak-anak, dan perempuan. Renakta adalah mitra DP3AKB dalam hal sosialisasi pencegahan kekerasan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Balai Pemasyarakatan (Bapas), adalah mitra dalam hal penanganan kasus kekerasan
- d. Kejaksaan Negeri Kelas II A Balikpapan, adalah mitra dalam hal penanganan kasus kekerasan
- e. Pengadilan Negeri Kelas IA Balikpapan, adalah mitra dalam hal penanganan kasus kekerasan
- f. Pengadilan Agama, adalah mitra dalam hal dispensasi nikah bagi anak
- g. Kementerian Agama, adalah mitra dalam hal narasumber pencegahan kekerasan
- h. RS dr. Kanujoso Djatiwibowo dalam hal visum korban
- i. RSUD Beriman, adalah mitra dalam hal penanganan korban
- j. 27 Puskesmas, adalah mitra dalam hal visum dan penanganan korban
- k. Fasilitas kesehatan/Klinik; kerjasamanya adalah dalam bentuk pelayanan terhadap penggunaan alat kontrasepsi (alkon).
- l. BKKBN Provinsi, adalah mitra dalam hal pembinaan /edukasi terhadap catin, baduta, balita, remaja, lansia
- m. Dinas Kesehatan, adalah mitra dalam hal pembinaan /edukasi terhadap catin, baduta, balita, remaja dan lansia
- n. DKUMKMP, adalah mitra dalam hal Kerjasama peningkatan UPPKA
- o. BPC-AKU (badan pengurus cabang andalan kelompok UPPKA), adalah mitra dalam rangka pembinaan terhadap UPPKA
- p. HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia)  
Anggota HIMPSI merupakan para profesional di bidang Psikologi, mencakup Psikolog, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi dan Doktor Psikologi. HIMPSI adalah mitra DP3AKB dalam hal kerjasama untuk konseling / narasumber.
- q. Akademisi (Poltekba), adalah mitra dalam hal peningkatan kapasitas kader UPPKA.

**2.2. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah**

**a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Pelayanan perangkat daerah pada Dinas P3AKB kota Balikpapan meliputi 3 (tiga) urusan wajib non pelayanan dasar, yakni urusan pemberdayaan perempuan & perlindungan anak, urusan pengendalian

penduduk & keluarga berencana dan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Dimana dalam menjalankan 3 (tiga) urusan wajib dimaksud tentu saja berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang diatur dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang PEMDA (khususnya yang diatur dalam romawi I huruf H, M dan N terkait pembagian urusan pemerintahan yang diampu oleh perangkat daerah).

Potensi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada perangkat daerah pada umumnya timbul karena dari potensi dari kekuatan yang dimiliki (*Strength*) yang ada belum didayagunakan secara optimal, potensi dari kelemahan yang ada (*weakness*) kurang diantisipasi untuk diatasi, peluang (*opportunity*) yang tidak dimanfaatkan serta potensi ancaman (*threat*) yang tidak diantisipasi.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dapat dipecahkan/ ada solusinya, maka tiap permasalahan akan dicoba untuk dilakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya yang bisa saja merupakan faktor penentu keberhasilannya, dimana faktor penentu keberhasilan ini bisa saja merupakan faktor kritis, hasil kerja dan faktor lainnya yang mempunyai daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pelayanan perangkat daerah DP3AKB kota Balikpapan dalam penyelenggaraan 3 (tiga) urusan pemerintah yang ditangani di kota Balikpapan.

Pada bagian ini akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing urusan yang menjadi kewenangan perangkat daerah, antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9. Simpulan Isu Strategis DP3AKB Kota Balikpapan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kurangnya akses dan penyebaran informasi mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta hak-hak perempuan dan anak, menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memahami dan terlibat.	1. Penyediaan Data Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	perempuan menghadapi diskriminasi dan ketidaksetaraan	Ketimpangan gender yang meliputi gaji yang tidak adil, ketidakhadiran perempuan di posisi eksekutif, dan kesenjangan gender dalam porsi kerja	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak	Belum optimalnya upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan terhadap perempuan serta upaya pengarusutamaan gender di tingkat pemerintah daerah
		2. Masih tingginya Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.			Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (Kelembagaan, sumber daya, layanan dan program, pemantauan evaluasi dan pelaporan	
					Persentase Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak pada Perangkat Daerah	



Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta terbatasnya pendampingan dan layanan bagi korban	3. Penyediaan Data Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	masalah KDRT dan Trafficking yang merupakan kekerasan yang korbanya hampir 95 perempuan dan anak	peningkatan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kasus KDRT, dan kekerasan seksual	Ratio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Belum optimalnya implementasi kabupaten/ kota layak anak dan perlindungan terhadap perempuan)
		4. Penyediaan Data Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.				
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan kurangnya partisipasi masyarakat		keterlibatan aktif dan kolaborasi yang efektif untuk berkontribusi signifikan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, demokrasi, lingkungan yang sehat, dan ekonomi yang adil bagi semua orang.	Peran Kelembagaan Masyarakat dalam pembangunan nasional	Peran Kelembagaan Masyarakat dalam pembangunan daerah	Peran Kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi dalam pembangunan belum optimal.
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	tingginya angka kelahiran, kurangnya pemahaman masyarakat tentang KB, dan kurangnya akses pelayanan KB di beberapa wilayah	5. Penyediaan Data Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age SpeciDic Fertility Rate/ASFR)	tren penurunan angka kelahiran di banyak negara, khususnya negara maju, dan dampaknya terhadap pertumbuhan populasi, ekonomi, dan struktur demografi	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	Masih belum optimalnya upaya Pengendalian Penduduk dan peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan Keluarga Berencana serta upaya pembangunan ketahanan keluarga

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
		6. Penyediaan Data Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.		Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)	Angka Kelahiran Total (Total Fertility/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	
		7. Masih tingginya angka Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) dan perlu diturunkan		Meningkatnya Kontrasepsi (CPR)		
		8. Belum Tercapainya Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern dan perlu ditingkatkan				
	Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Keluarga		Peran BKB, BKR atau BKL dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terkait kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan.	meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga di berbagai tahap usia, terutama dalam konteks kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan	Peran BKB, BKR atau BKL dalam mendukung tujuan pembangunan daerah	

Tabel 2.10. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Kurangnya akses dan penyebaran informasi mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta hak-hak perempuan dan anak, menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memahami dan terlibat	1 Ketersediaan data terpilah yang benar dan akurat masih kurang maksimal.	1 Data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) dalam pemenuhan hak anak di berbagai bidang pembangunan agar responsif terhadap pemenuhan hak anak.
		2 IPG Kota Balikpapan masih di bawah angka nasional;	2 Kolaborasi dan Kerja seluruh OPD yang terkait, Disdik indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, UHH (Dinkes), Pendapatan perkapita (Dinsos), dari Disperkim, Disnaker, dll; perlu segera diterbitkan PERDA PUG
		3 Capaian komponen pembentukan IPG belum optimal.	3 Masih minimnya partisipasi perempuan dalam lembaga legislative (DPRD), ditandai dengan partisipasi perempuan di lembaga legislative tahun 2024 sebesar 26,7% (belum mencapai 30%).
2	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta terbatasnya pendampingan dan layanan bagi korban dan perempuan yang perlu ditangani dan membutuhkan waktu yang lama	1 Penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melibatkan banyak pihak (instansi vertikal maupun horisontal dan lingkungan sekitar)	1 Masih adanya korban kekerasan pada perempuan dan anak yang belum berani melaporkan khususnya kasus KDRT karena terkait aspek merasa aib atau ketergantungan ekonomi pada si pelaku kekerasan;
		2 Peran lintas sektor lain dan atau aparat penegak hukum untuk proses penanganan memerlukan waktu untuk pengumpulan alat bukti dan pendampingan oleh tenaga ahli terhadap korban	1 Masih minimnya tindakan hukum terhadap terduga pelaku kasus pencabulan yang dilaporkan korban ke UPTD PPA dan kepolisian karena persyaratan alat bukti.
			2 Belum optimalnya kapasitas SDM penyedia layanan perlindungan perempuan korban kekerasan dan jejaringnya dalam penanganan kasus kekerasan yang terjadi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			3 Penanganan kasus lintas sektoral membutuhkan waktu yang relatif lama karena memerlukan alat bukti juga berurusan dengan penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan.
3	Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Keluarga	1 Pemahaman keluarga tentang pola pengasuhan yang tepat masih minim	1 Cakupan keluarga yang memiliki balita/ remaja/ lansia yang menjadi anggota kelompok BKB/ BKR/ BKL masih rendah; 2 Masih minimnya sarana prasarana KIE yang mendukung peningkatan pemahaman keluarga tentang pola pengasuhan anak, remaja dan lansia yang tinggal bersama dalam keluarga.
			3 Masih minimnya jumlah konselor pada layanan PUSPAGA yang tidak sebanding dengan jumlah lokasi layanan PUSPAGA yang ada atau tidak sebanding dengan tingginya permintaan narasumber terkait pola pengasuhan maupun anti <i>bullying</i> dari kelembagaan masyarakat/ institusi penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.
4	Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana	Keterbatasan kewenangan daerah dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana terutama dalam hal penyediaan SDM Penyuluh KB	1 Masih tingginya angka <i>unmet need</i> pada tahun 2024 sebesar 12,20%; 2 Masih tingginya angka kesertaan KB Non MKJP; 3 Pemahaman PUS tentang pilihan alat kontrasepsi KB MKJP masih rendah; 4 Masih kurangnya kuantitas dan kompetensi penyuluh KB.
5	Pemenuhan Hak Anak dan KLA (Kota Layak Anak)	Belum optimalnya komitmen dan peran serta stakeholder terhadap pemenuhan hak anak	1 Belum optimalnya peran gugus tugas perwujudan Balikpapan Menuju Kota Layak Anak; 2 Kurangnya pemahaman mengenai pelaksanaan KLA 3 Kurangnya dukungan dari pemerintah, swasta, masyarakat dan media terhadap keberhasilan KLA

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			4 Belum terpenuhinya Sumber Daya Aparatur terampil yang mendukung keberhasilan KLA
			5 Masih minimnya sarana prasarana yang mendukung perwujudan pelayanan ramah anak pada puskesmas;
			6 Belum adanya ruang bermain ramah anak yang sudah tersertifikasi.
			7 belum tersedianya aturan turunan (perwali) pelaksanaan Perda Kota Layak Anak (Perda No. 2 tahun 2025)
6	Pelayanan Kesekretariatan	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan	1 Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik;
			2 Belum optimalnya monitoring evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan;
			3 Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan perangkat daerah DP3AKB Kota Balikpapan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah tercantum pada tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel. 2.11. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<b>Misi ke-3:</b> Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Masyarakat yang Sehat dan Terdidik <b>Tujuan:</b> SDM Balikpapan yang Berkualitas. <b>Sasaran 8:</b> Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	1. Minimnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang dimiliki Perangkat Daerah tidak sebanding dengan luasnya rentang kendali kewenangan urusan yang ditangani Perangkat Daerah; 2. Banyaknya kewenangan terkait tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah (3 urusan digabung dalam 1 perangkat daerah) tidak diimbangi dengan struktur kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan beban kerja perangkat daerah (hanya 4 bidang menangani 3 urusan)	1. Keterbatasan dana dukungan untuk peremajaan sarana dan prasarana kerja Perangkat Daerah.	1. Ada tupoksi kelurahan yakni Kasi Pemerintahan yang terkait data potensi wilayah yang harusnya dimiliki tingkat kelurahan; 2. Adanya aplikasi <i>online</i> yang dibuat dan disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
		1. Masih tingginya angka <i>Unmet Need</i> (14,04%); 2. Masih rendahnya tingkat kesertaan PUS ber KB MKJP (26,29%); 3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas Penyuluh KB; 4. Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi KB; belum sesuai	1. Kinerja Lini Lapangan (PKB); 2. Semakin sulit mencari kader masyarakat yang bisa mendukung program Bangga Kencana (kader yang ada sudah banyak yang berusia pra lansia/ lansia;	1. Memiliki Penyuluh KB sebanyak 79,41% dari 34 kelurahan yang ada; 2. Memiliki kader PPKBD & Sub PPKBD; 3. Memiliki Forum Genre dan Forum Anak; 4. Memiliki kader PIK Remaja; 5. Memiliki Kader Kampung KB;

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		kebutuhan daerah; 5. Proses konseling KB & Kespro bagi PUS di Faskes belum efektif diarahkan pada pilihan MKJP; 6. Masih minimnya jumlah pembentukan & intensitas pembinaan pada SSK (Sekolah Satuan Kependudukan) dan Kelompok PIK Remaja; 7. Keterbatasan kapasitas OPD KB di daerah dalam pengendalian penduduk; 8. Masih adanya pernikahan pada remaja berusia di bawah 20 tahun; 9. Masih tingginya jumlah penduduk yang dipengaruhi faktor migrasi; 10. Masih rendahnya pemahaman keluarga tentang pola pengasuhan (ilmu keparentingan) bagi anak & remaja serta lansia, yang ditandai dengan masih rendahnya cakupan keluarga yang memiliki balita/remaja/ lansia menjadi anggota	3. Situasi pandemi covid berpengaruh pada proses pembinaan kader masyarakat (kurang efektif dan kendali dalam pembinaan menggunakan sistim daring); 4. Validitas data di tingkat mikro kurang; 5. Komitmen PKB selaku petugas Lini Lapangan (SDM sudah jenuh/ PKB lama) untuk melakukan pembinaan lapangan maupun pembentukan poktan/ PIK Remaja baru dinilai kurang; 6. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap KB, Kespro dan Pola pengasuhan belum baik; 7. Dana APBD minim untuk support sarana & prasarana KIE program Bangga Kencana; 8. Kurangnya kompetensi dan kualifikasi perempuan;	6. Adanya dukungan pusat untuk mewujudkan tujuan dari program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana; 7. Adanya kebijakan internasional dan nasional yang mendukung pengarus-utamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak; 8. Adanya komitmen yang kuat dari pemimpin di tingkat nasional dan daerah, masyarakat dan kelembagaan masyarakat; 9. Meningkatnya tingkat keberanian masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; 10. Adanya Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak di Tingkat RT; 11. Adanya Forum Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di tingkat Kelurahan; 12. Adanya APSAI

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		kelompok kegiatan; 11. Belum semua perangkat daerah melaksanakan proses perencanaan yang responsif gender; 12. Masih minimnya partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif; 13. Masih rendahnya kontribusi pendapatan per kapita perempuan; 14. Belum tersedianya data terpilah di seluruh perangkat daerah; 15. Masih minimnya SDM perangkat daerah yang mampu melakukan analisis gender pada proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan; 16. Minimnya ketersediaan dana untuk upaya pemberdayaan perempuan; 17. Belum tersedianya PSGA (Pusat	9. Tingkat pemahaman keluarga tentang pola pengasuhan minim; 10. Tingkat pemahaman terkait hak anak dan perlindungan khusus anak pada masyarakat atau lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak masih minim; 11. Belum adanya Perda Pengarusutamaan Gender dalam Proses Pembangunan; 12. Situasi pandemi covid 19 yang menghambat pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.	Cabang Kota Balikpapan; 13. Adanya Forum PUSPA; 14. Adanya PERDA tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Balikpapan; 15. Adanya komitmen dari anggota Gugus Tugas Perwujudan Balikpapan Menuju KLA; 16. Adanya peluang kemitraan lintas perangkat daerah dan instansi vertikal dalam penanganan kasus perempuan dan anak; 17. Adanya UPTD PPA dan juga RSUD sebagai PPT Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 18. Adanya kader kelembagaan masyarakat yang siap dukung proses pembangunan (TP. PKK, Posyandu, LPM, POSYANTEK dan Karang Taruna).



No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>Studi Gender &amp; Anak) pada Perguruan Tinggi yang ada di kota Balikpapan;</p> <p>18. Minimnya pemahaman masyarakat terkait pola pengasuhan pada anak dan remaja;</p> <p>19. Masih minimnya pemahaman masyarakat tentang regulasi perlindungan perempuan dan anak;</p> <p>20. Belum optimalnya peran lembaga penegak hukum dalam pengungkapan alat bukti terkait aduan terduga korban kasus asusila/ cabul / kekerasan seksual;</p> <p>21. Situasi pandemi covid 19 yang belum teratasi;</p> <p>22. Minimnya peran orang tua/ keluarga dalam pengawasan kepada anak anaknya dalam proses Pembelajaran sistim daring;</p> <p>23. Minimnya dukungan dana bagi penyediaan sarana &amp; prasarana KIE</p>		

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 24. Situasi pandemi covid yang menghambat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.		

**b. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang.

Isu isu strategis yang akan muncul diantaranya lingkup:

b.1. SDGs (*Sustainable Development Goals*)

Berdasarkan PP Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) apabila dikaitkan dengan 3 urusan yang menjadi kewenangan perangkat daerah adalah indikator “Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan”, “untuk program PUG dan pemberdayaan perempuan” serta “menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, “untuk program pembinaan KB serta program pemberdayaan & peningkatan keluarga sejahtera”

b.2. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kabupaten PPU Provinsi Kalimantan Timur

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kabupaten PPU Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembangunan wilayah di luar Jawa, yang diarahkan untuk mendorong pemerataan dan percepatan pengurangan kesenjangan serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di luar jawa terutama di wilayah timur. Namun, rencana ini apabila tidak dipersiapkan dengan baik akan juga memindahkan permasalahan sosial yang biasa terjadi pada ibu kota negara. Balikpapan sebagai kota penyangga IKN yang baru harus siap dengan perencanaannya terkait antisipasi permasalahan social yang bersentuhan dengan isu anak, perempuan dan keluarga. Salah satunya meningkatnya jumlah penduduk miskin atau kurang mampu, yang apabila tidak diantisipasi maka bisa saja berdampak pada meningkatnya anak putus sekolah, anak jalanan, pengemis, ledakan jumlah peduduk, anak ngelem, anak & perempuan korban kekerasan, dll.

### b.3. Bonus Demografi

Bonus demografi merupakan suatu fenomena dimana struktur penduduk sebenarnya sangat menguntungkan dari sisi pembangunan, karena jumlah penduduk yang berusia umur produktif (15-64 tahun) sangat besar, sementara usia muda semakin mengecil dan proporsi usia lanjut belum banyak. Kondisi ini adalah potensi besar *engine of growth* bagi suatu daerah untuk melompat menjadi daerah maju dari segi pembangunan ekonomi akibat kecilnya beban yang ditanggung, apabila SDM yang tersedia benar benar berkualitas. Apabila tidak berkualitas, maka bonus demografi yang terjadi akan menjadi beban daerah.

Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode diskusi kelompok terarah yang melibatkan bidang terkait, dengan menyesuaikan 3 (tiga) urusan yang menjadi kewenangan tupoksi dari Dinas P3AKB Kota Balikpapan.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan fungsi pelayanan pada DP3AKB Kota Balikpapan yang telah diuraikan pada tabel 3.1 sampai dengan tabel 3.10, maka dapat disusun beberapa alternatif isu strategis seperti dalam tabel di bawah ini, yaitu:

**Tabel 2.12. Alternatif Isue Strategis**

<b>BIDANG FUNGSI PELAYANAN DP3AKB</b>	<b>ALTERNATIF ISU STRATEGIS</b>
Kesekretariatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah SDM dalam mendukung fungsi pelayanan DP3AKB kota Balikpapan;</li> <li>2. Kompetensi SDM DP3AKB kota Balikpapan dalam mendukung fungsi pelayanan DP3AKB kota Balikpapan;</li> <li>3. Ketersediaan sarana dan prasarana baik kuantitas maupun kualitas yang mendukung kinerja perangkat daerah;</li> <li>4. Ketersediaan dana yang mencukupi untuk dukung kinerja perangkat daerah, dimana dari 3 urusan yang menjadi kewenangan perangkat daerah semua bermuara pada fungsi KIE pada masyarakat (= penyuluhan)</li> </ol>
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya peran perangkat daerah dalam melaksanakan PPRG, ditandai dengan 70,59% perangkat daerah yang melaksanakan PPRG;</li> <li>2. Belum tersedia sistem data terpilah;</li> <li>3. Belum optimalnya implementasi kebijakan kab/kota layak anak sampai ke tingkat kelurahan bahkan RT;</li> <li>4. Belum optimalnya lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;</li> <li>5. Rendahnya kontribusi pendapatan perempuan dapat dilihat dari jumlah kontribusi perempuan tahun 2020 sebesar 26,75%;</li> <li>6. Kurang optimalnya peran lembaga penyedia layanan termasuk jejaring dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya kasus asusila/ cabul yang terkadang minim bukti;</li> <li>7. Kebijakan pusat yang selalu muncul baru yang tidak seiring dengan dinamika di daerah;</li> <li>8. Keterlibatan dunia usaha, perguruan tinggi (akademisi) dan lembaga-lembaga non government belum maksimal.</li> </ol>
Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecenderungan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk meskipun dipengaruhi aspek migrasi, pengendalian penduduk keluarga berencana dan pembinaan;</li> <li>2. Tingginya <i>Unmet Need</i> KB.</li> <li>3. Keterlibatan atau pelibatan lembaga mitra seperti lembaga pendidikan dan swasta dalam mendukung sasaran DP3AKB Kota Balikpapan;</li> <li>4. Optimalisasi sarana pelayanan kesehatan;</li> <li>5. Pemanfaatan dukungan dari pemerintah pusat dalam mewujudkan tujuan program <u>Bangga Kencana</u>;</li> </ol>
Keluarga Sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih minimnya pemahaman keluarga tentang bagaimana memberikan pola pengasuhan bagi anak, remaja dan lansia yang hidup dan berkembang dalam sebuah keluarga.</li> <li>2. Keterlibatan Kemenag melalui peran KUA sebagai Mitra dalam membangun paradigma keluarga sejahtera;</li> <li>3. Pemanfaatan mitra yang bisa dijadikan pendamping untuk pelaku usaha berbasis keluarga (UPPKA/ Industri Rumahan)</li> </ol>

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode diskusi internal terarah yang melibatkan bidang terkait, dengan menyesuaikan pada permasalahan yang dihadapi terkait 3 (tiga) urusan wajib yang selama ini dihadapi oleh perangkat daerah DP3AKB kota Balikpapan.

Berdasarkan hasil diskusi ditetapkan **isu strategis pelayanan perangkat daerah** adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan terhadap perempuan serta upaya pengarusutamaan gender di tingkat pemerintah daerah
2. Belum optimalnya implementasi kabupaten/ kota layak anak dan perlindungan terhadap perempuan.
3. Masih belum optimalnya upaya pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan Keluarga Berencana serta upaya pembangunan ketahanan keluarga.
4. Peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi dalam pembangunan belum optimal.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi DP3AKB Kota Balikpapan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi DP3AKB Kota Balikpapan dimasa datang. Suatu permasalahan yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Beberapa isu strategis yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13. Simpulan Isu Strategis DP3AKB Kota Balikpapan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kurangnya akses dan penyebaran informasi mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta hak-hak perempuan dan anak, menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memahami dan terlibat.	<b>1. Dampak Bangkitan Pembangunan IKN</b>  a. Peningkatan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan serta masyarakat miskin dan rentan	perempuan menghadapi diskriminasi dan ketidaksetaraan	Ketimpangan gender yang meliputi gaji yang tidak adil, ketidakhadiran perempuan di posisi eksekutif, dan kesenjangan gender dalam porsi kerja	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak	Belum optimalnya upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan terhadap perempuan serta upaya pengarusutamaan gender di tingkat pemerintah daerah
					Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (Kelembagaan, sumber daya, layanan dan program, pemantauan evaluasi dan pelaporan	
					Persentase Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak pada Perangkat Daerah	
	tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta terbatasnya pendampingan dan layanan bagi korban	b. Perlindungan anak dan perempuan	masalah KDRT dan Trafficking yang merupakan kekerasan yang korbanya hampir 95 perempuan dan anak	peningkatan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kasus KDRT, dan kekerasan seksual	Ratio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Belum optimalnya implementasi kabupaten/ kota layak anak dan perlindungan terhadap perempuan)

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	tingginya angka kelahiran, kurangnya pemahaman masyarakat tentang KB, dan kurangnya akses pelayanan KB di beberapa wilayah	c. Menjamin terpenuhinya nutrisi, khususnya anak pada usia balita	Tren penurunan angka kelahiran di banyak negara, khususnya negara maju, dan dampaknya terhadap pertumbuhan populasi, ekonomi, dan struktur demografi	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	Masih belum optimalnya upaya Pengendalian Penduduk dan peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan Keluarga Berencana serta upaya pembangunan ketahanan keluarga
				Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)	Angka Kelahiran Total (Total Fertility/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	
				Meningkatnya Kontrasepsi (CPR)		
		Masih minimnya cakupan keluarga memiliki balita/ remaja/ lansia yang menjadi anggota kelompok BKB/ BKR/ BKL		Peran BKB, BKR atau BKL dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terkait kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan.	meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga di berbagai tahap usia, terutama dalam konteks kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan	Peran BKB, BKR atau BKL dalam mendukung tujuan pembangunan daerah
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan kurangnya partisipasi masyarakat	<b>2. Optimalisasi Pengelolaan Sanitasi, Limbah dan Sampah</b>	keterlibatan aktif dan kolaborasi yang efektif untuk berkontribusi signifikan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, demokrasi, lingkungan yang sehat, dan ekonomi yang adil bagi semua orang.	Peran Kelembagaan Masyarakat dalam pembangunan nasional	Peran Kelembagaan Masyarakat dalam pembangunan daerah	Peran Kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi dalam pembangunan belum optimal.
		Peningkatan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sampah dan limbah				

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah**

##### **3.1.1. Visi**

Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan terpilih untuk periode 2025-2029 telah dilantik pada tanggal 20 Pebruari 2025 dan telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan periode 2025-2029.

Visi merupakan rumusan umum tentang keadaan atau kondisi daerah yang akan terwujud pada akhir periode pembangunan jangka menengah sebagai hasil pembangunan selama lima tahun. Perumusan visi RPJMD berdasarkan visi kepala daerah terpilih. Visi Kepala Daerah Kota Balikpapan merupakan landasan utama dalam merumuskan berbagai kondisi pendukung, baik pada level misi, tujuan, sasaran, hingga program prioritas daerah. Adapun visi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yaitu:

**” Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman”**

Visi tersebut mencerminkan Kota Balikpapan sebagai kota maju berperadaban tinggi yang nyaman dihuni dengan spriritualitas yang mewarnai seluruh aktifitas penduduk kota. Dalam kallimat visi tersebut terdapat tiga kata kunci yaitu kota global, nyaman untuk semua, dan madinatul iman. Berikut penjelasan masing-masing dari kata kunci visi:

##### **1. Kota Global**

Kota global merujuk pada kondisi yang mencerminkan Kota Balikpapan yang maju, modern, tangguh, inovatif, dan setara dengan kemajuan kota besar yang ada didunia. Kota global juga mencerminkan kesinambungan pembangunan yang semakin progresif diberbagai bidang seperti ekonomi, infrastruktur, sosial budaya, lingkungan, dan pelayanan publik. Kota Balikpapan sendiri memiliki posisi dan peran penting dalam pembangunan regional, nasional, maupun global. Balikpapan mendukung peran pembangunan wilayah Pulau Kalimantan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di kawasan Timur Indonesia. Sebagai Kawasan Perkotaan Besar, Kota Balikpapan juga memiliki peran besar terhadap pusat perdagangan barang dan jasa, serta industri yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

##### **2. Nyaman untuk Semua**

Nyaman untuk semua mencerminkan upaya menciptakan lingkungan, layanan, dan kebijakan yang dapat dinikmati dan diakses oleh semua kalangan tanpa memandang latar belakang, fisik, usia, dan status sosial. Nyaman untuk semua bertujuan untuk memastikan pembangunan berjalan secara inklusif yang berfokus pada kenyamanan dan aksesibilitas bagi setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk semua juga merujuk pada realitas sosiokultural bahwa masyarakat Balikpapan yang cukup heterogen dan multikultur, sehingga menjadikan Kota Balikpapan sebagai kota milik bersama yang inklusif, damai dan kondusif.



### **3. Madinatul Iman**

Madinatul Iman merujuk kepada aspek spiritualitas yang mewarnai seluruh aktivitas penduduk Kota Balikpapan. Sebagai aspek spiritual, konsep madinatul iman memiliki lima prinsip sebagai berikut:

- Spiritualitas menjadi roh dari seluruh kegiatan Masyarakat
- Manusia dengan spiritualitas menjadi pusat Pembangunan
- Seluruh masyarakat ikut terlibat aktif dalam perencanaan dan implementasi rencana kota
- Transparansi dalam seluruh kegiatan masyarakat dan pemerintah
- Kolaborasi/kerjasama lebih diprioritaskan daripada kompetisi disegala aspek kehidupan

#### **3.1.2. Misi**

Kondisi dan cita-cita yang telah dirumuskan melalui visi daerah dicapai melalui berbagai langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaannya. Langkah langkah yang perlu dilakukan ini dituangkan dalam bentuk misi daerah yang akan dilakukan selama lima tahun mendatang. Dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, terdapat lima misi besar yang memandu proses pembangunan daerah yang telah menggambarkan empat dimensi utama pembangunan, yaitu: sumber daya manusia, ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan. Berikut masing-masing misi pembangunan daerah selama lima tahun mendatang.

1. Misi 1 Membangun dan Mengembangkan Pemerintah yang Bersih dan Profesional Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat.
2. Misi 2 Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Terpadu yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Masyarakat Balikpapan.
3. Misi 3 Menbangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan Terdidik.
4. Misi 4 Mengembangkan Perekonomian yang Tumbuh Berkeadilan untuk Semua
5. Misi 5 Konsisten Menjaga Lingkungan Hidup yang Sehat dan Nyaman untuk Semua.

### **3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

#### **3.2.1. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP & PA)**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian PP & PA. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan  
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:
  - a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender  
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG).
  - b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:  
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:  
Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan  
rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;

2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan  
dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap  
perempuan termasuk TPPO.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:  
Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan  
komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%)  
perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak  
anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak  
anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:  
Persentase kabupaten/ kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait  
perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus  
yang memperoleh layanan sesuai dengan standar;

2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh  
(100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan  
perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus  
kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:  
Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus  
kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif  
sesuai dengan standar.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga  
masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan  
perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan  
dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan  
serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan  
perempuan dan perlindungan anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:  
Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Balikpapan berdasarkan Sasaran Renstra K/L (Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PP&PA Tahun 2020–2024	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah (DP3AKB Kota Balikpapan)	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Sasaran 1: Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capaian IPG maupun IDG relatif rendah apabila dibandingkan dengan capaian nasional namun relative lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian provinsi Kaltim, kecenderungan fluktuatif angkanya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender sampai ke tahap evaluasinya belum optimal.</li> <li>• Masih minimnya peran OPD penggerak PUG dalam mengawal terwujudnya Perencanaan dan penganggaran serta evaluasi pembangunan yang responsif gender</li> <li>• Tenaga terlatih analisis gender yang ada di masing masing OPD masih terbatas pada Kasubbg Program OPD dan sudah banyak yang purna tugas.</li> <li>• Belum tersedianya data terpilah di seluruh perangkat daerah</li> <li>• Minimnya anggaran yang tersedia untuk mendukung upaya pemberdayaan perempuan (belum masuk skala prioritas)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan</li> <li>• Pengarusutamaan gender menjadi bagian yang diatur dalam target SDGs dan juga dalam Permendagri yang mengatur tentang pedoman penyusunan anggaran</li> <li>• PUG telah diimplementasikan kedalam perencanaan Pembangunan di Kota Balikpapan</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan mencapai 0,038 (artinya dari 100.000 penduduk perempuan ada 3-4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya kualitas dan kuantitas personil kelembagaan yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kompetensi dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan kelembagaan masyarakat peduli perlindungan perempuan dan anak (seksi PPA tingkat RT dan Forum PPATBM tingkat kelurahan)</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PP&PA Tahun 2020–2024	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah (DP3AKB Kota Balikpapan)	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>orang yang mendapatkan tindakan kekerasan).            • Perempuan khususnya anak &amp; remaja rentan menjadi obyek eksploitasi seksual.            • Belum optimalnya peran kelembagaan penegak hukum perlindungan perempuan dan anak dalam pengembangan alat bukti dalam penanganan kasus seksual/ cabul/ asusila pada perempuan</p>	<p>hal pengembangan alat bukti sesuai ketentuan dalam penanganan perkara pidana pada perempuan &amp; anak untuk kasus cabul/ kekerasan seksual/ asusila</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kerjasama yang baik antara Pemda dengan lembaga penegak hukum</li> <li>Adanya pendanaan yang dialokasikan untuk pendampingan bagi perempuan korban kekerasan termasuk peningkatan kualitas SDM lembaga penyedia layanan perempuan dan anak korban kekerasan</li> <li>Keberadaan UPTD PPA sebagai unit pelayanan terhadap Korban kekerasan</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak yang berada di jalanan yang rawan terpaparnya pergaulan seks bebas-narkoba-premanisme-sodomi-kejahatan seksual, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).</li> <li>Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</li> <li>Belum 100% terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, wajib belajar 12 tahun, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan mendapatkan pengasuhan yang baik dari orang tua/ pengganti orang tua / pengasuhan alternatif</li> <li>Belum adanya Ruang Bermain Ramah Anak dan Pusat Kreatifitas Anak yang terstandarisasi sesuai standar yang berlaku untuk RBRA &amp; PKA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagian besar anggota Personil Gugus Tugas KLA yang berasal dari Perangkat Daerah tertentu saat ini focus disibukkan dengan penanganan wabah pandemic covid 19 (Dinkes, Dinsos, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan, Diskominfo)</li> <li>Pembelajaran daring bagi anak sekolah yang rawan berdampak bebasnya anak mengakses konten yang tidak layak (apabila tidak dilakukan pengawasan, pembinaan yang baik dari orang tua)</li> <li>Keterbatasan dana yang dialokasikan untuk perangkat daerah yang mengampu urusan PP &amp; PA, khususnya dalam hal mengedukasi para pihak tentang konvensi hak anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak</li> <li>Adanya arahan pusat, bahwa KLA bukan program baru, semua selama ini sudah dilakukan oleh para perangkat daerah yang berbasis hak anak dalam setiap kluster KLA</li> <li>Adanya penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga yang dikelola PEMDA (PUSPAGA) yang sudah banyak dikenal dan dimanfaatkan masyarakat.</li> <li>Adanya penyediaan layanan perempuan dan anak korban kekerasan yang dikelola PEMDA (UPTD Perlindungan Perempuan &amp; Anak)</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PP&PA Tahun 2020–2024	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah (DP3AKB Kota Balikpapan)	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum semua keluarga mengakses layanan air bersih</li><li>• Belum adanya jaminan kepastian bahwa anak dipastikan mengakses informasi yang layak anak dalam kesehariannya apalagi di era 4.0 saat ini.</li><li>• Belum semua aparaturnya kelurahan dan kecamatan memiliki komitmen layak anak di wilayahnya.</li></ul>		

**3.2.2. Telaah Renstra Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)**

Presiden dan Wakil Presiden RI telah menyampaikan visi dan misi Pemerintah periode tahun 2020 – 2024 dalam rangka “meneruskan jalan perubahan untuk Indonesia maju” yang menjadi acuan Kementerian PPN/ Bappenas dalam menyusun RPJMN 2020 – 2024 dan harus menjadi acuan oleh seluruh Kementerian/ Lembaga (K/ L) dalam menyusun RENSTRA K/ L periode 2020–2024.

Terkait dengan upaya pencapaian visi nasional, BKKBN memiliki visi untuk “Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang Guna Mendukung Tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk pencapaian visi tersebut dijabarkan misi sebagai berikut:

- 1) Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang;
- 2) Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif;
- 3) Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup;
- 4) Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global;
- 5) Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi;
- 6) Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparaturnya.

Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKKBN dalam rangka mendukung visi nasional adalah:

- 1) Menurunnya Angka Kelahiran Total/ *Total Fertility Rate* (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024;

- 2) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/ *Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024;
- 3) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/ *UnmetNeed* sebesar 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024;
- 4) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/ *Age Specific Fertility Ratio* (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per 1.000 kelahiran pada 2024;
- 5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024;
- 6) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

Tabel 3.2. Permasalahan Dinas P3AKB Kota Balikpapan Terhadap Pencapaian Sasaran Strategis K/L (BKKBN RI) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Tujuan dan Sasaran dari BKKBN RI Tahun 2020 – 2024	Permasalahan Pelayanan DP3AKB Kota Balikpapan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
a. Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi <i>modern</i> (mCPR) 61,78 % pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 % pada tahun 2024	Masih minimnya cakupan PUS ber KB pola MKJP, data tahun 2020 baru menunjukkan angka sebesar 26,29%. Masih banyak PUS yang menggunakan pola non MKJP (khususnya jenis alat kontrasepsi suntik menjadi primadona pilihan PUS), sehingga rawan terjadinya kasus DO ber-KB	1.Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi KB yang dikirim dari pusat tidak sesuai kebutuhan Moral hazard di kalangan oknum tenaga layanan KB	1. Ada dana alokasi khusus dari pemerintah pusat untuk program KB dan KK 2. Droping Alat Kontrasepsi dari Pusat 3. Dukungan dari Fasilitas Kesehatan pelayanan KB 4. Garapan program bersama antara OPD KB, Dinkes 5. Adanya dukung IBI dan IDI 6. Adanya dukungan PKB, POKTAN, IMP
b. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15–19 tahun), dengan target 25 per 1000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per 1000 kelahiran pada tahun 2024	Masih terdapatnya PUS yang isterinya dibawah usia 20 tahun (0,47%)	2.Belum optimalnya peran PIK-R dalam melakukan kegiatan dan penyuluhan konseling	7. Adanya fasilitas pelayanan konseling remaja di sekolah (PIK Remaja) maupun PUSPAGA di 4 lokasi layanan

3.2.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya Perlindungan & Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak;
  - Meningkatnya layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
2. Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak yang berkualitas;
  - Meningkatnya penyajian data gender dan anak di tingkat Provinsi.
3. Meningkatkan Pelayanan administrasi kependudukan yang lebih up to date dan komprehensif;
  - Meningkatnya layanan administrasi kependudukan.
4. Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian dan Ketahanan Keluarga;
  - Meningkatnya kualitas keluarga.
5. Meningkatkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan di Kalimantan Timur;
  - Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
6. Meningkatkan layanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur sipil negara serta sarana prasarana.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dikaitkan dengan sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah pengampu urusan PP & PA dan urusan PP & KB provinsi Kaltim tercantum pada tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan DP3AKB Kota Balikpapan berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi (DKP3A Provinsi Kaltim) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra DKP3A Prov Kaltim Tahun 2019 - 2024	Permasalahan Pelayanan DP3AKB Kota Balikpapan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari rasio kekerasan terhadap</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terbatasnya kualitas dan kuantitas personil kelembagaan yang melayani penanganan kasus kekerasan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan kelembagaan masyarakat peduli perlindungan perempuan dan anak (seksi PPA</li></ul>

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra DKP3A Prov Kaltim Tahun 2019 - 2024	Permasalahan Pelayanan DP3AKB Kota Balikpapan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan mencapai 0,038 ( artinya dari 100.000 penduduk perempuan ada 3-4 orang yang mendapatkan tindakan kekerasann).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perempuan khususnya anak &amp; remaja rentan menjadi obyek eksploitasi seksual.</li> <li>Belum optimalnya peran kelembagaan penegak hukum perlindungan perempuan dan anak dalam pengembangan alat bukti dalam penanganan kasus seksual / cabul / asusila pada perempuan</li> </ul>	<p>terhadap perempuan dan anak, khususnya kompetensi dalam hal pengembangan alat bukti sesuai ketentuan dalam penanganan perkara pidana pada perempuan &amp; anak untuk kasus cabul/ kekerasan seksual/ asusila</p>	<p>tingkat RT dan Forum PPATBM tingkat kelurahan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kerjasama yang baik antara Pemda dengan lembaga penegak hukum</li> <li>Adanya pendanaan yang dialokasikan untuk pendampingan bagi perempuan korban kekerasan termasuk peningkatan kualitas SDM lembaga penyedia layanan perempuan dan anak korban kekerasan</li> </ul>
2	Meningkatnya upaya penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan yang berdaya saing bidang politik dan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capaian IPG maupun IDG relatif rendah apabila dibandingkan dengan capaian nasional namun relatif lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian provinsi Kaltim, kecenderungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender sampai ke tahap evaluasinya belum optimal.</li> <li>Masih minimnya peran OPD penggerak PUG dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya komitmen kepala daerah untuk mendukung pelaksanaan pengarusutamaam gender dalam pembangunan</li> <li>Pengarusutamaan gender menjadi bagian yang diatur dalam target SDGs dan juga dalam Permendagri yang</li> </ul>



No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra DKP3A Prov Kaltim Tahun 2019 - 2024	Permasalahan Pelayanan DP3AKB Kota Balikpapan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		fluktuatif angkanya (naik turun, cenderung menurun di masa pandemic covid 19)	<p>mengawal terwujudnya Perencanaan dan penganggaran serta evaluasi pembangunan yang responsif gender</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenaga terlatih analis gender yang ada di masing masing OPD masih terbatas pada Kasubbbg Program OPD dan sudah banyak yang purna tugas.</li> <li>• Minimnya anggaran yang tersedia untuk mendukung upaya pemberdayaan perempuan (belum masuk skala prioritas)</li> </ul>	mengatur tentang pedoman penyusunan anggaran
3	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Keluarga Berencana	Masih minimnya cakupan PUS ber KB pola MKJP, data tahun 2020 baru menunjukkan angka sebesar 26,29%. Masih banyak PUS yang menggunakan pola non MKJP (khususnya jenis alat kontrasepsi suntik menjadi primadona pilihan PUS), sehingga rawan terjadinya kasus DO ber-KB	<p>1. Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi KB yang dikirim dari pusat tidak sesuai kebutuhan</p> <p>2. Moral hazard di kalangan oknum tenaga layanan KB</p>	<p>1. Ada dana alokasi khusus dari pemerintah pusat untuk program KB dan KK</p> <p>2. Droping Alat Kontrasepsi dari Pusat</p> <p>3. Dukungan dari Fasilitas Kesehatan pelayanan KB</p> <p>4. Garapan program bersama antara OPD KB, Dinkes</p> <p>5. Adanya dukung IBI dan IDI</p> <p>6. Adanya dukungan PKB, POKTAN, IMP</p>

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra DKP3A Prov Kaltim Tahun 2019 - 2024	Permasalahan Pelayanan DP3AKB Kota Balikpapan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Minimnya pemahaman keluarga tentang pola pengasuhan yang tepat.	<p>1. Cakupan keluarga yang memiliki balita/ remaja/ lansia yang menjadi anggota kelompok BKB/ BKR/ BKL masih rendah;</p> <p>2. Masih minimnya sarana prasarana KIE yang mendukung peningkatan pemahaman keluarga tentang pola pengasuhan anak, remaja dan lansia yang tinggal bersama dalam keluarga;</p> <p>3. Masih minimnya jumlah konselor pada layanan PUSPAGA yang tidak sebanding dengan jumlah lokasi layanan PUSPAGA yang ada atau tidak sebanding dengan tingginya permintaan narasumber terkait pola pengasuhan maupun anti bullying dari kelembagaan masyarakat/ institusi penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.</p>	<p>1. Ada dana alokasi khusus dari pemerintah pusat untuk program KB dan KS</p> <p>2. Adanya dukungan PKB, POKTAN, IMP dan PIK Remaja serta Forum GENRE, Forum Anak dan Saka Kencana</p> <p>3. Adanya layanan konseling serta pemateri pola pengasuhan dari Psikolog PUSPAGA</p> <p>4. Adanya program KEMENAG berupa Bimbingan Perkawinan bagi para CATIN</p>

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra DKP3A Prov Kaltim Tahun 2019 - 2024	Permasalahan Pelayanan DP3AKB Kota Balikpapan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak	Belum tersedia data terpilah pada seluruh perangkat daerah	Regulasi Forum Satu Data masih bias gender	Ada SK Forum 1 Data yang Sekretariatnya di Bappeda Litbang

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan DP3AKB Kota Balikpapan berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi (DPMPD Provinsi Kaltim) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra BPMPD Prov Kaltim Tahun 2024-2026	Permasalahan Pelayanan DP3AKB Kota Balikpapan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa	1. Peran & Fungsi kelembagaan masyarakat belum optimal dalam pembangunan di daerah 2. Minimnya Kelurahan yang memiliki profil kelurahan sesuai yang diarahkan Kemdagri (PRODESKEL) 3. Teknologi Tepat Guna produk POSYANTEK belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat 4. Kelembagaan masyarakat (LPM, Karang Taruna, RT) yang belum optimal peran dukungnya 5. POKJANAL POSYANDU yang belum bisa berfungsi optimal 6. SDM yang ada pada OPD tidak bisa optimal melaksanakan Fasilitasi TP PKK Kota dalam upaya gerakan pemberdayaan masyarakat dengan alasan keterbatasan	1. Urusan pemberdayaan masyarakat baru dilimpahkan ke OPD DP3AKB pada tahun 2022, sehingga <i>mapping</i> penghambat belum tergambar secara jelas; 2. Keterbatasan jumlah SDM yang ada pada OPD tidak bisa optimal melaksanakan Fasilitasi kegiatan kegiatan pada TP PKK Kota dalam upaya gerakan pemberdayaan masyarakat 3. Belum optimalnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam mendukung program-program kerja dinas	1. Adanya kelembagaan masyarakat seperti LPM, Karang Taruna, TP PKK, RT yang siap dilibatkan 2. Perguruan Tinggi yang memiliki program pemberdayaan masyarakat (contoh KKN) 3. Tersedianya dana dalam APBD

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra BPMPD Prov Kaltim Tahun 2024-2026	Permasalahan Pelayanan DP3AKB Kota Balikpapan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		jumlah personil OPD yang tidak sesuai dengan kompleknya 3 urusan wajib yang ditangani oleh Perangkat Daerah		

**3.2.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Seyogyanya dalam penyusunan Renstra SKPD wajib menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, namun mengingat Dinas P3AKB merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi lebih kepada upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam mendukung program pembangunan yang bersifat non fisik/ lebih banyak kepada penyuluhan masyarakat maka penyesuaian Renstra SKPD Dinas P3AKB Kota Balikpapan kurang bersentuhan langsung dengan konsep RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, namun dampak keberhasilan program dan kegiatannya memiliki dampak tidak langsung terhadap terciptanya masyarakat yang berkualitas yang nantinya akan berpengaruh positif pada pemanfaatan potensi daerah yang berwawasan lingkungan.

Tabel 3.5. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang sudah dilaksanakan DP3AKB dan sudah mencapai Target Nasional Di Kota Balikpapan

TPB	No. Indikator	Indikator
Menjamin Kehidupan Yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.
	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.
Mencapai Kestaraan gender mendukung dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.
Menciptakan Perdamaian. Menyediakan Akses Keadilan. dan Membangun Kelembagaan Yang Tangguh	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
		Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II).

Tabel 3.6. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang sudah dilaksanakan DP3AKB tetapi belum mencapai Target Nasional di Kota Balikpapan

TPB	No. Indikator	Indikator
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.
	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.
	5.6.1.(b)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).

Tabel 3.7. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang belum dilaksanakan DP3AKB dan belum mencapai Target Nasional di Kota Balikpapan

TPB	No. Indikator	Indikator
Menjamin Kehidupan Yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.
	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.

Tabel 3.8. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang tidak atau belum ada data di Kota Balikpapan

TPB	No. Indikator	Indikator
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.6.1.(a)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.
Menciptakan Perdamaian. Menyediakan Akses Keadilan. dan Membangun Kelembagaan Yang Tangguh	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.

3.3. Tujuan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran merupakan kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan di sebuah wilayah. Tujuan dan sasaran pembangunan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka

mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan pada tahun 2025-2029.

Berdasarkan pemahaman dasarnya, **tujuan** adalah ***pernyataan tentang hal hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah terkait 3 (tiga) urusan yang menjadi kewenangan perangkat daerah.***

Penentuan tujuan ini sekurang kurangnya harus mencakup 4 (empat) kriteria berikut:

- 1) Tujuan harus *sejalan dengan visi dan misi* Pemerintah Daerah dan berlaku pada periode jangka menengah;
- 2) Tujuan harus dapat menunjukkan *suatu kondisi yang ingin dicapai* pada periode jangka menengah;
- 3) Tujuan *harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki* pemerintah daerah;
- 4) Tujuan *harus dapat mengarahkan perumusan sasaran strategis, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi* pemerintah daerah.

Sedangkan **sasaran** adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berpijak pada pemahaman dasar tersebut dikaitkan dengan permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi oleh perangkat daerah dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah pada tahun 2025-2029, maka disepakati tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat kota Balikpapan pada tahun 2025-2029 yang akan datang.

Penjelasan singkat tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah untuk perangkat daerah DP3AKB kota Balikpapan pada tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

#### ***Tujuan: Masyarakat yang Berdaya dan Setara Gender***

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender di kota Balikpapan adalah melalui perwujudan anggaran yang *responsive gender*. Dan hal tersebut relevan untuk mendukung ketercapaian target kinerja dari salah satu indikator kinerja pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yakni masyarakat yang setara gender, dengan target kinerja Indeks Ketimpangan Gender di Kota Balikpapan.

#### **3.4. Sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2029**

Memperhatikan tujuan di atas, maka **sasaran** hasil yang akan/ ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD kota Balikpapan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 3.4.1.** Meningkatnya upaya perlindungan dan peran serta perempuan dalam Pembangunan;
- 3.4.2.** Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak;

- 3.4.3.** Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga;
- 3.4.4.** Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan;
- 3.4.5.** Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dan sasaran merupakan perwujudan dari visi dan misi pembangunan. Tujuan mencerminkan kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam periode lima tahun. Setiap tujuan memiliki sasaran yang dirumuskan untuk menggambarkan pencapaian tujuan tersebut. Berikut adalah rumusan tujuan, sasaran, dan indikator dalam Renstra DP3AKB Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

Tabel 3.10. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DP3AKB Kota Balikpapan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Masyarakat yang harmonis dan inklusif			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,176	0,174	0,172	0,170	0,168	0,166	tahun 2024: 0,178
	Masyarakat yang berdaya dan setara gender		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90.36	90.36	90.37	90.38	90.39	90.5	tahun 2024: 90.34
		Meningkatnya upaya perlindungan dan peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75.05	75.06	75.07	75.08	75.09	75.1	
		Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	63.75	63.75	63.76	63.77	63.78	63.79	tahun 2023: 63.74
		Meningkatnya Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	66.6	67.8	68.9	70	70.9	71.9	tahun 2024: 65.43
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berdaya pada Tingkat Provinsi/Nasional	81,25	83	83	85	85	86	tahun 2024: 81,25%
		Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	71.21	72	73	74	75	76	tahun 2024: 64.64



### **3.5. Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029**

Dengan telah diuraikannya tujuan dan sasaran yang disepakati oleh Perangkat Daerah dalam upaya untuk pencapaian Visi dan mendukung pelaksanaan Misi ketiga dari RPJMD kota Balikpapan pada Tahun 2025–2029, selanjutnya akan dijabarkan bagaimana upaya mencapainya melalui penentuan strategi pembangunan sesuai kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah dan arah kebijakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

#### **3.5.1. Strategi**

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran yang sudah disepakati dengan efektif dan efisien. Strategi juga digunakan sebagai sarana melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Keterkaitan antara strategi dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1. Masyarakat yang berdaya dan setara gender	1. Meningkatnya upaya perlindungan dan peran serta perempuan dalam Pembangunan	1. Mereview dan memperkuat pemahaman perangkat daerah terkait pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan pentingnya PPRG
		2. Mereview dan memperkuat peran Perangkat Daerah Penggerak PUG (“OPD Driver PUG”)
		3. Mengoptimalkan peran POKJA PUG dan <i>Focal Point</i> PUG dalam terwujudnya PPRG
		4. Mendorong peran Perguruan Tinggi yang ada di kota Balikpapan untuk terbentuknya lembaga kajian di PT (Pusat Studi Gender dan Anak)
		5. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)
	2. Meningkatnya pemenuhan hak anak	6. Mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak di seluruh perangkat daerah yang berbasis hak anak 7. Memperkuat mekanisme kerjasama/ kemitraan antara UPTD PPA dengan lembaga penegak hukum serta perangkat daerah yang lain dalam upaya perlindungan perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus. 8. Mengoptimalkan peran LPKS khusus ABH dalam melakukan proses rehabilitasi sosial bagi Anak Pelaku Tindak Pidana 9. Meningkatkan pemahaman perangkat daerah, aparat penegak hukum dan masyarakat tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 10. Meningkatkan optimalisasi peran Gugus Tugas Perwujudan Balikpapan Menuju Layak Anak 11. Meningkatkan komitmen Dinas Pendidikan dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak 12. Meningkatkan komitmen Kelurahan dalam pengembangan DEKELA (Desa/ Kelurahan Layak Anak) 13. Meningkatkan komitmen Dinas Kesehatan dalam pengembangan pelayanan Ramah Anak pada Puskesmas (PRAP)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		14. Meningkatkan komitmen Kecamatan dalam pengembangan KELANA (Kecamatan Layak Anak) 15. Meningkatkan pemahaman tentang KHA pada para pihak (perangkat daerah, dunia usaha, kelembagaan masyarakat dan media massa) 16. Mengoptimalkan peran Forum Anak sebagai 2 P 17. Memperkuat/ meningkatkan kualitas layanan PUSPAGA 18. Memperkuat kemitraan perangkat daerah dengan kelembagaan masyarakat dalam PUHA dan perlindungan khusus anak serta perlindungan perempuan (Seksi PPA Tingkat RT dan Forum PPATBM di Kelurahan) 19. Memperkuat peran kemitraan dalam bentuk penyelenggaraan konsultasi publik (KP) terkait capaian kinerja perangkat daerah yang memerlukan lintas sektoral terkait.
	3. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	1. Penguatan kapasitas fasilitas kesehatan dan jaringan/ jejaring yang melayani KB 2. Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KB/ KR 3. Pelaksanaan Pelayanan KB Momentum khusus MKJP 4. Tata Kelola dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi KB 5. Meningkatkan kualitas data pelaporan/ data lapangan (DALLAP) 6. Memperkuat kerjasama dengan KUA se kota Balikpapan dalam penyuluhan bagi CATIN 7. Memperkuat pemahaman PUS anggota POKTAN untuk ber-KB 8. Memperkuat promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB <i>Pasca</i> Persalinan (KB PP) 9. Peningkatan penyebarluasan materi KIE program Bangsa Kencana 10. Peningkatan kinerja tenaga PKB dan pemberdayaan masyarakat melalui pergerakan kader PPKBD/ Sub PPKBD

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		11. Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk dan pengembangan <i>Grand design</i> Pembangunan Kependudukan (GDPK)
		12. Penguatan pemahaman keluarga tentang 8 (delapan) fungsi keluarga
		13. Peningkatan pemahaman pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga
		14. Peningkatan pemahaman pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja
		15. Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga
		16. Penguatan pelayanan keluarga ramah lansia melalui 7 dimensi lansia tangguh
		17. Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga akseptor KB Lestari, keluarga peserta MKJPkhususnya MOP dan MOW serta peserta KB Mandiri di wilayah Kampung KB
		18. Memetakan potensi industri rumahan dan/ atau UPPKA yang sudah ada untuk dilakukan pembinaan dan potensi intervensi permodalan
		19. Menjalin kemitraan dengan perbankan/ Lembaga keuangan dan koperasi dalam pengembangan industri rumahan dan/ atau UPPKA.
	4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	1. Memperkuat komitmen aparaturnya kelurahan dalam penyediaan dan <i>update data</i> prodeskel (profil kelurahan) sebagai data dasar untuk peningkatan peran serta masyarakat
		2. Mengoptimalkan peran POKJANAL POSYANDU tingkat kota dalam memperkuat jejaring kemitraan dengan POKJANAL POSYANDU tingkat Kecamatan dan POKJA POSYANDU tingkat Kelurahan
		3. Memperkuat jejaring kemitraan dalam hal pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan dengan kelembagaan masyarakat (LPM, Karang Taruna dan TP PKK).

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	5. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Meningkatkan keselarasan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah; 2. Memperkuat pengawasan dan tata kelola keuangan yang akuntabel di perangkat daerah; 3. Memperkuat sistem evaluasi terhadap perencanaan secara berkala (3 bulan sekali).

**3.5.2. Penahapan Pembangunan**

Penahapan Pembangunan adalah prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan pembangunan Renstra merupakan bagian dari strategi dalam Renstra. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra. Penahapan pembangunan sendiri merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala dinas. Adanya tahapan pembangunan akan menciptakan sinergi antara perencanaan jangka menengah dan tahunan. Tahapan pembangunan Renstra DP3AKB Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 akan menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Berikut merupakan tahapan pembangunan jangka menengah DP3AKB Kota Balikpapan selama periode 2025-2029. Penahapan Renstra DP3AKB disajikan seperti pada table dibawah ini:

Tabel.3.11. Penahapan Renstra DP3AKB

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak, Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender dalam Pembangunan	Meningkatkan optimalisasi peran Gugus Tugas Perwujudan Balikpapan Menuju Kota Layak Anak	Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Kontrasepsi	Mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak di seluruh perangkat daerah yang berbasis hak anak	Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu

**3.6. Arah Kebijakan**

Dengan telah diuraikannya tujuan dan sasaran yang disepakati oleh Perangkat Daerah dalam upaya untuk pencapaian Visi dan mendukung pelaksanaan Misi ketiga dari RPJMD kota Balikpapan pada Tahun 2025-2029, selanjutnya akan dijabarkan bagaimana upaya mencapainya melalui penentuan strategi pembangunan sesuai kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah dan arah kebijakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasional NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal.

Keterkaitan antara arah kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.12. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

<b>VISI RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029</b>	<b>: Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman</b>
<b>MISI KE-3 RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029</b>	<b>: Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan Terdidik</b>
<b>Tujuan ke - 5 RPJMD</b>	<b>: SDM Balikpapan yang Berkualitas</b>
<b>Sasaran ke - 8 RPJMD</b>	<b>: Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif</b>

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
1	Masyarakat yang harmonis dan inklusif	Penguatan keluarga berkualitas, pendidikan karakter, dan pemenuhan hak anak serta kesetaraan gender	Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan	
			Peningkatan perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak dengan fokus mitigasi terjadinya	
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			Peningkatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	
			Peningkatan kualitas SDM Kelurahan/desa dan kelembagaan masyarakat	



3.7. Indikator Kinerja (IKU)

Tabel. 3.13. Penjabaran Sasaran Strategis dan Indikatornya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya upaya perlindungan dan peran serta perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai Indeks
2	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai Indeks
3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai Indeks
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang Berdaya pada Tingkat Provinsi/Nasional	%
5	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN**

#### **4.1. Uraian Program.**

Sebagai tindaklanjut dari telah dilantiknnya Wali Kota dan Wakil Walikota sebagai Kepala Daerah Kota Balikpapan Periode Tahun 2025-2030 pada tanggal 20 Pebruari 2025 secara serentak seluruh Indonesia, maka Pemerintah Kota Balikpapan menetapkan Visi Misi Kepala Daerah terpilih sebagai Visi Misi Pemerintah Kota untuk periode tahun 2025-2029 berikut penetapan dokumen RPJMD Kota Balikpapan yang akan dipergunakan sebagai panduan/ pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi Dinas P3AKB kota Balikpapan.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu:

1. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan anggaran;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Diharapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas P3AKB Kota Balikpapan secara optimal dan akuntabel tetap mempertimbangkan pula 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional sehingga visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan yang telah disepakati bisa disinergikan dalam langkah operasionalnya di lapangan sesuai hakekat tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional di kota Balikpapan.

Langkah operasional terkait penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas P3AKB Kota Balikpapan untuk tahun 2025-2030 dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan serta sub kegiatan yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota berdasarkan isu-isu strategis yang ada dan juga memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas P3AKB kota Balikpapan.

Dinas P3AKB kota Balikpapan menjalankan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah apabila mengacu kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan dimaksud meliputi 3 (tiga) urusan wajib yang konkuren non pelayanan dasar yakni:

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kelurahan).

Program prioritas Dinas P3AKB kota Balikpapan disepakati dan ditetapkan dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah dan juga disesuaikan dengan lampiran Permendagri 90/ 2019 dan juga Kepmendagri

050-3708 Tahun 2020 serta Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tahun 2023 beserta pemutakhirannya.

Berdasarkan hasil kesepakatan rapat pembahasan Renstra Dinas P3AKB kota Balikpapan yang dilaksanakan pada bulan Mei 2025, maka disepakati program prioritas yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2025–2030, antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Keterkaitan antara urusan Pemerintahan dan Program Prioritas  
Dinas P3AKB Kota Balikpapan Tahun 2025-2030

NO	NAMA URUSAN WAJIB	PROGRAM PRIORITAS
1.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan b. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak c. Program Perlindungan Perempuan d. Program Pemenuhan Hak Anak e. Program Perlindungan Khusus Anak f. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
2.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Program Pengendalian Penduduk b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
3.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat	a. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat b. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4	Non Urusan (Keseekretariatan)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

A. Indikator Kinerja Program Prioritas

Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Tabel 4.2 Keterkaitan Antara Program Prioritas dan Indikator Kinerja Program Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS
	Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Jumlah OPD yang Telah Melakukan Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender (%)
2	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah (%)
3	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)
4	Program Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)
5	Program Perlindungan Khusus	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS
	Anak	
6	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
Urusan Pengendalian Penduduk & KB		
7.	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)
8.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (%)
9.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan/ poktan (%)
Urusan Pemberdayaan Masyarakat		
10.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kota (4 lembaga) <i>Keterangan: PKK, Karang Taruna, LPM, Posyandu</i>
11	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi
12.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal).

#### 4.2. Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sebagai penjabaran operasional terhadap rencana program prioritas dan indikator kinerja program yang disesuaikan dengan skala prioritas di Daerah, maka disepakati kegiatan dan sub kegiatan indikatif yang akan direncanakan akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2030 yang akan datang, sebagai bagian dari upaya untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan pada periode tahun 2025-2030, dimana dapat disampaikan disini bahwa dalam pemilihan jenis kegiatan ini bersifat indikatif disesuaikan dengan prediksi kemampuan daerah serta isu-isu strategis yang ada pada saat proses penyusunan dokumen RENSTRA Dinas P3AKB Kota Balikpapan, namun dalam perkembangannya kegiatan yang bersifat indikatif dimaksud dimungkinkan untuk dilakukannya penyesuaian/ revisi sesuai perkembangan situasi dan kondisi yang kemungkinan terjadi pada saat periode tahun 2025-2030 dimaksud.

Untuk lebih jelasnya rincian kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang rencananya akan dilaksanakan oleh Dinas P3AKB Kota Balikpapan dimaksud dapat dilihat pada Tabel 4.2 yang memuat secara rinci tentang Tujuan, Sasaran, Outcome, Output, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, serta Data Capaian pada awal Tahun perencanaan RENSTRA (Tahun 2024), Target Kinerja dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada periode Tahun 2025-2030 dan Kerangka

Pendanaan Indikatif untuk mendukung target kinerja tahun 2025-2030, serta kondisi kinerja yang diharapkan akan dicapai pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (pada Tahun 2030).

Tabel 4.2. Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Masyarakat yang harmonis dan inklusif					Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	
	Masyarakat yang berdaya dan setara gender				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	
		Meningkatnya upaya perlindungan dan peran serta perempuan dalam pembangunan			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
			Meningkatnya kualitas dana efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan		Persentase Anggaran yang Responsif Gender (%) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
				Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang mendapatkan advokasi/pendampingan PPRG (OPD) (%)	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
				terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan (OPD)	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
				<b>Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>
				<i>Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</i>	<i>Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (lembaga)</i>	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</i>
			<b>Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak</b>		<b>Persentase Data Gender dan Anak yang terpilah</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>
				<b>Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah OPD Terlatih Penyediaan Data Terpilah</b>	<b>Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>
				<i>Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (dokumen)</i>	<i>Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota</i>
			<b>Menurunnya kekerasan terhadap perempuan</b>		<b>Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
				<b>Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>jumlah kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (kegiatan)</b>	<b>Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>
				<i>Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)</i>	<i>Kerjasama Para Pihak Dalam Pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota</i>
				<b>Tersedianya layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>
					<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota</i>	<i>Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota</i>
		<b>Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak</b>			<b>Indeks Perlindungan Anak (IPA)</b>	
			<b>Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif</b>		<b>Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK</b>
				<b>Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang dibina (lembaga)</b>	<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
				<i>Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota (dokumen)</i>	<i>Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>
				<i>Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota yang mendapatkan pendampingan (lembaga)</i>	<i>Pendampingan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>
			<b>Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak</b>		<b>Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>
				<b>Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</b>
				<i>Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA</i>	<i>Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/ Kota (orang)</i>	<i>Peningkatan Kapasitas kepada SDM yang Terkait Langsung Pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
				<b>Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Penyelesaian Penanganan Klien pada UPTD PPA (%)</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>
				<i>Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota</i>	<i>Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota</i>
				<b>Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>
				<i>terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota</i>	<i>Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus (dokumen) tingkat daerah kabupaten/kota (dokumen)</i>	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>
		<b>Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga</b>			<b>Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)</b>	
			<b>Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak</b>		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
				<b>Tersedianya Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase keluarga yang mendapatkan layanan di Puspaga (%)</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
				<i>Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Keluarga)</i>	<i>Layanan Konsultasi dan Konseling Keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota</i>
			<b>Terkendalnya penambahan jumlah penduduk</b>		<b>Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>
					<b>Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun</b>	
				<b>Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Persentase sekolah siaga kependudukan yang terbentuk</b>	<b>Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>
				<i>Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal</i>	<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal (satuan pendidikan)</i>	<i>Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal</i>

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
				<b>Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan data yang dikumpulkan/diupdate tepat waktu</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>
				<i>Tersedianya Data dan Informasi Keluarga</i>	<i>Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia (dokumen)</i>	<i>Penyediaan Data dan Informasi Keluarga</i>
			<b>Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>		<b>Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>
					<b>Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)</b>	
					<b>Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi (Demand Satisfied)</b>	
				<b>Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Jumlah PUS Peserta KB Aktif (orang)</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>
				<i>Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (laporan)</i>	<i>Pengendalian Program KKBPK</i>
				<i>Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</i>	<i>Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</i>	<i>Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</i>
				<b>Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)</b>	<b>Jumlah Kelompok IMP terbina oleh PKB (kelompok)</b>	<b>Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)</b>

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
				<i>Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>	<i>Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (orang)</i>	<i>Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>
				<i>Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/ PLKB)</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/ PLKB) (laporan)</i>	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/ PLKB)</i>
				<b>Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kab/Kota</b>	<b>Persentase Kepesertaan KB MKJP (%)</b>	<b>Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kab/Kota</b>
				<i>Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	<i>Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya (laporan)</i>	<i>Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya</i>
				<b>Terlaksananya Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB</b>	<b>Jumlah kelurahan yang berperan dalam pelaksanaan program bangga kencana (kelurahan)</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB</b>
					<b>Proporsi /Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri/berkelanjutan</b>	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
				<i>Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas</i>	<i>Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (kampung)</i>	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan dan pengelolaan Program bangga kencana di kampung Keluarga Berkualitas</i>
			<b>Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)</b>		<b>Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan/poktan</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>
					<b>Indeks Pembangunan Keluarga (i bangga)</b>	
			<b>Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>		<b>Persentase kelompok kegiatan yang aktif</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>
					<b>Indeks Lansia Berdaya</b>	
					<b>Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki remaja</b>	
				<i>Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif</i>	<i>Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (%)</i>	<i>Sub Kegiatan Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL</i>
				<i>Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)</i>	<i>Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))</i>

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
				<i>Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)</i>	<i>Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (unit)</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)</i>
				<i>Terlaksananya Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)</i>	<i>Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (orang)</i>	<i>Sub Kegiatan Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)</i>
				<i>Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)</i>	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (orang)</i>	<i>Sub Kegiatan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)</i>
				<i>Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas</i>	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas</i>	<i>Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas</i>
				<b>Terlaksananya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Persentase organisasi yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan keluarga (%)</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
				<i>Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga</i>	<i>Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (laporan)</i>	<i>Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga</i>
				<i>Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)</i>	<i>Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)</i>	<i>Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)</i>
		<b>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan</b>			<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berdaya pada Tingkat Provinsi/Nasional</b>	-
			<b>Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan</b>		<b>Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kota (4 lembaga)</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>
				<b>Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang Aktif</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
				<i>Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (dokumen)</i>	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>
				<i>Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (lembaga)</i>	<i>Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>
				<i>Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>
				<i>Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</i>	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</i>
				<i>Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</i>
			<b>Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>		<b>Persentase kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
				<b>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Kelurahan/Desa yang dibina dan diawasi</b>	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>
				<i>Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun</i>	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa</i>
				<i>Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</i>	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</i>
		<b>Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</b>			<b>Nilai AKIP Perangkat Daerah</b>	
			<b>Meningkatnya kualitas layanan internal perangkat daerah</b>		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>
				<b>Tersedianya indikator kinerja yang relevan, terukur dan selaras dari tingkat individu hingga organisasi</b>	<b>Nilai LKJIP</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
				<i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>
				<b>Laporan realisasi anggaran perangkat daerah secara berkala dan akuntabel</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
				<i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
				<b>Data dan dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tertib dan akuntabel</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
				<i>Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Beserta Atribut Kelengkapannya</i>
				<i>Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>
				<b>Laporan pelaksanaan administrasi umum dan penegelolaan sarana perkantoran secara efektif dan efisien</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
				<i>Tersedianya Peralatan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>
				<i>Tersedianya Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>
				<i>Tersedianya Kantor Bahan Logistik</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>
				<i>Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>
				<i>Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	<i>Jumlah Laporan Kunjungan Tamu</i>	<i>Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>
				<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
				<i>Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	<i>Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>
				<b>Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan perangkat daerah</b>	<b>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
				<i>Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>
				<i>Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>
				<b>Laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
				<i>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>
				<i>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>
				<b>Barang milik daerah dalam kondisi baik dan fungsional melalui kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala</b>	<b>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
				<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>
				<i>Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)</i>	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>
				<i>Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>

**4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif**

Untuk lebih jelasnya rincian kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang rencananya akan dilaksanakan oleh Dinas P3AKB Kota Balikpapan dimaksud dapat dilihat pada Tabel 4.3 dibawah ini, yang memuat secara rinci tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, serta Data Capaian pada awal Tahun perencanaan RENSTRA (Tahun 2024), Target Kinerja dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada periode Tahun 2025-2030 dan Kerangka Pendanaan Indikatif untuk mendukung target kinerja tahun 2025-2030, serta kondisi kinerja yang diharapkan akan dicapai pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (pada Tahun 2030).

Tabel.4.3. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				17.042.200.464		18.942.868.000		20.430.861.000		20.530.000.000		22.210.957.000		
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13.503.280.922		15.175.000.000		16.330.861.000		16.310.000.000		17.825.957.000		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	77	78	13.503.280.922	79	15.175.000.000	80	16.330.861.000	81	16.310.000.000	82	17.825.957.000	2.08.2.13.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19.924.100		0		0		0		0		
Tersedianya Indikator Kinerja Yang Relevan, Terukur dan Selaras Dari Tingkat Individu Hingga Organisasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	19.924.100	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				19.924.100		0		0		0		0		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	19.924.100	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.000.075.900		11.200.000.000		11.600.000.000		11.800.000.000		12.185.957.000		
Laporan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Secara Berkala dan Akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	431	840	10.000.075.900	840	11.200.000.000	840	11.600.000.000	840	11.800.000.000	840	12.185.957.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.000.075.900		11.200.000.000		11.600.000.000		11.800.000.000		12.185.957.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	431	840	10.000.075.900	840	11.200.000.000	840	11.600.000.000	840	11.800.000.000	840	12.185.957.000		
2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				98.737.500		100.000.000		150.000.000		100.000.000		255.000.000		
Data dan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tertib dan Akuntabel	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	98.737.500	0	100.000.000	1	150.000.000	0	100.000.000	1	255.000.000		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	4		10		10		10		20			
2.08.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				37.537.500		0		50.000.000		0		55.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	37.537.500	0	0	1	50.000.000	0	0	1	55.000.000		
2.08.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				61.200.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	4	61.200.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	20	200.000.000		
2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.671.093.850		1.855.000.000		1.985.000.000		2.145.000.000		2.330.000.000		
Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum dan Pengelolaan Sarana Perkantoran Secara Efektif dan Efisien	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	12	1.671.093.850	12	1.855.000.000	12	1.985.000.000	12	2.145.000.000	12	2.330.000.000		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	4		4		4		4		4			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	8		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	69	70		75		75		80		85			
2.08.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				582.974.075		600.000.000		670.000.000		725.000.000		750.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	20	582.974.075	20	600.000.000	20	670.000.000	20	725.000.000	20	750.000.000		
2.08.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				28.900.610		30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	2	28.900.610	2	30.000.000	2	35.000.000	2	40.000.000	2	45.000.000		
2.08.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				449.815.610		550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	8	449.815.610	12	550.000.000	12	600.000.000	12	650.000.000	12	700.000.000		
2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				108.640.820		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	108.640.820	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000		
2.08.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				18.793.900		20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	12	18.793.900	12	20.000.000	12	25.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000		
2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				361.968.835		455.000.000		455.000.000		500.000.000		600.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	69	70	361.968.835	75	455.000.000	75	455.000.000	80	500.000.000	85	600.000.000		
2.08.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				120.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	4	120.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		
2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				836.027.000		850.000.000		1.440.861.000		1.000.000.000		1.600.000.000		
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Sesuai Dengan Spesifikasi dan Kebutuhan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6	6	836.027.000	6	850.000.000	6	1.440.861.000	6	1.000.000.000	6	1.600.000.000		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		4		0		6			
2.08.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				836.027.000		850.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.050.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6	6	836.027.000	6	850.000.000	6	1.000.000.000	6	1.000.000.000	6	1.050.000.000		
2.08.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		440.861.000		0		550.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	4	440.861.000	0	0	6	550.000.000		
2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				150.484.072		220.000.000		195.000.000		220.000.000		275.000.000		
Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan dan Pertanggungjawaban Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	13	13	150.484.072	13	220.000.000	13	195.000.000	13	220.000.000	13	275.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12				12				12			
2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				55.329.072		60.000.000		65.000.000		70.000.000		75.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	55.329.072	12	60.000.000	12	65.000.000	12	70.000.000	12	75.000.000		
2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				95.155.000		160.000.000		130.000.000		150.000.000		200.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	13	13	95.155.000	13	160.000.000	13	130.000.000	13	150.000.000	13	200.000.000		
2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang				726.938.500		950.000.000		960.000.000		1.045.000.000		1.180.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Urusan Pemerintahan Daerah														
Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik dan Fungsional Melalui Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	144	150	726.938.500	155	950.000.000	160	960.000.000	165	1.045.000.000	170	1.180.000.000		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	58	56		56		56		60		60			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			
2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				452.866.000		550.000.000		575.000.000		650.000.000		700.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	58	56	452.866.000	56	550.000.000	56	575.000.000	60	650.000.000	60	700.000.000		
2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				133.246.000		150.000.000		160.000.000		170.000.000		180.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	144	150	133.246.000	155	150.000.000	160	160.000.000	165	170.000.000	170	180.000.000		
2.08.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				140.826.500		250.000.000		225.000.000		225.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	140.826.500	2	250.000.000	2	225.000.000	2	225.000.000	2	300.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				152.014.700		185.000.000		250.000.000		270.000.000		285.000.000		
Meningkatnya kualitas dana efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	40,02	41	152.014.700	42	185.000.000	43	250.000.000	44	270.000.000	45	285.000.000	2.08.2.13.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	52,71	53,17		53,4		53,63		53,86		54,07			
2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				67.826.200		100.000.000		150.000.000		160.000.000		165.000.000		
Persentase OPD yang mendapatkan advokasi/pendampingan PPRG (OPD) (%)	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	3	67.826.200	5	100.000.000	5	150.000.000	5	160.000.000	5	165.000.000		
2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				67.826.200		100.000.000		150.000.000		160.000.000		165.000.000		
terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	3	67.826.200	5	100.000.000	5	150.000.000	5	160.000.000	5	165.000.000		
2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				84.188.500		85.000.000		100.000.000		110.000.000		120.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota (kegiatan)	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	2	1	84.188.500	2	85.000.000	2	100.000.000	2	110.000.000	2	120.000.000		
2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				84.188.500		85.000.000		100.000.000		110.000.000		120.000.000		
Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	2	1	84.188.500	2	85.000.000	2	100.000.000	2	110.000.000	2	120.000.000		
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				200.000.000		200.000.000		220.000.000		230.000.000		240.000.000		
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	220.000.000	100	230.000.000	100	240.000.000	2.08.2.13.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000		
Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	1	100.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.03.2.01.0004 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000		
Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	1	100.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000		
2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	38	36	100.000.000	34	100.000.000	32	100.000.000	30	100.000.000	28	100.000.000		
2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	38	36	100.000.000	34	100.000.000	32	100.000.000	30	100.000.000	28	100.000.000		
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				295.000.000		307.868.000		325.000.000		325.000.000		350.000.000		
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) (Indeks)	89,94	89,96	295.000.000	89,96	307.868.000	89,98	325.000.000	90	325.000.000	90	350.000.000	2.08.2.13.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				295.000.000		307.868.000		325.000.000		325.000.000		350.000.000	KELUARGA BERENCANA	
Tersedianya Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	12.808	10.000	295.000.000	12.850	307.868.000	12.870	325.000.000	12.890	325.000.000	12.910	350.000.000		
2.08.04.2.03.0004 - layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota				295.000.000		307.868.000		325.000.000		325.000.000		350.000.000		
Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	12.808	10.000	295.000.000	12.850	307.868.000	12.870	325.000.000	12.890	325.000.000	12.910	350.000.000		
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				62.493.400		65.000.000		75.000.000		85.000.000		95.000.000		
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase Data Gender dan Anak yang Terpilah (%)	0	26	62.493.400	27	65.000.000	29	75.000.000	30	85.000.000	31	95.000.000	2.08.2.13.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				62.493.400		65.000.000		75.000.000		85.000.000		95.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	1	62.493.400	1	65.000.000	1	75.000.000	1	85.000.000	1	95.000.000		
2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota				62.493.400		65.000.000		75.000.000		85.000.000		95.000.000		
Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	1	62.493.400	1	65.000.000	1	75.000.000	1	85.000.000	1	95.000.000		
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				1.100.000.000		1.190.000.000		1.340.000.000		1.350.000.000		1.360.000.000		
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	61,27	61,28	1.100.000.000	61,29	1.190.000.000	61,3	1.340.000.000	61,31	1.350.000.000	61,32	1.360.000.000	2.08.2.13.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1.100.000.000		1.190.000.000		1.340.000.000		1.350.000.000		1.360.000.000		
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	1.100.000.000	1	1.190.000.000	1	1.340.000.000	1	1.350.000.000	1	1.360.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	979	982		984		986		988		990			
2.08.06.2.02.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				300.000.000		320.000.000		340.000.000		350.000.000		360.000.000		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	300.000.000	1	320.000.000	1	340.000.000	1	350.000.000	1	360.000.000		
2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				800.000.000		870.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	979	982	800.000.000	984	870.000.000	986	1.000.000.000	988	1.000.000.000	990	1.000.000.000		
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				1.729.411.442		1.820.000.000		1.890.000.000		1.960.000.000		2.055.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	79,33	79,55	1.729.411.442	79,66	1.820.000.000	79,74	1.890.000.000	79,89	1.960.000.000	80,5	2.055.000.000	2.08.2.13.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				779.411.442		800.000.000		825.000.000		850.000.000		875.000.000		
Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)	2.236	2.411	779.411.442	2.416	800.000.000	2.596	825.000.000	2.606	850.000.000	2.616	875.000.000		
2.08.07.2.01.0010 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota				779.411.442		800.000.000		825.000.000		850.000.000		875.000.000		
Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)	2.236	2.411	779.411.442	2.416	800.000.000	2.596	825.000.000	2.606	850.000.000	2.616	875.000.000		
2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				750.000.000		800.000.000		825.000.000		850.000.000		900.000.000		
Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	182	175	750.000.000	170	800.000.000	165	825.000.000	160	850.000.000	155	900.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				750.000.000		800.000.000		825.000.000		850.000.000		900.000.000		
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat kabupaten/Kota (Orang)	182	175	750.000.000	170	800.000.000	165	825.000.000	160	850.000.000	155	900.000.000		
2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000		220.000.000		240.000.000		260.000.000		280.000.000		
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1	1	200.000.000	1	220.000.000	1	240.000.000	1	260.000.000	1	280.000.000		
2.08.07.2.03.0009 - koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota				200.000.000		220.000.000		240.000.000		260.000.000		280.000.000		
terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1	1	200.000.000	1	220.000.000	1	240.000.000	1	260.000.000	1	280.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				7.257.799.506		5.455.000.000		5.130.000.000		5.687.628.000		4.735.000.000		
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				294.680.400		295.000.000		350.000.000		355.000.000		375.000.000		
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai dengan Regulasi (%)	100	100	294.680.400	100	295.000.000	100	350.000.000	100	355.000.000	100	375.000.000	2.08.2.13.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				294.680.400		295.000.000		350.000.000		355.000.000		375.000.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1	1	294.680.400	1	295.000.000	1	350.000.000	1	355.000.000	1	375.000.000		
	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	34	34				34		34		34			
2.13.04.2.01.0011 - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa				125.000.000		125.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	34	34	125.000.000	34	125.000.000	34	175.000.000	34	175.000.000	34	175.000.000		
2.13.04.2.01.0018 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				169.680.400		170.000.000		175.000.000		180.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1	1	169.680.400	1	170.000.000	1	175.000.000	1	180.000.000	1	200.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				6.963.119.106		5.160.000.000		4.780.000.000		5.332.628.000		4.360.000.000		
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kota (%)	0	100	6.963.119.106	100	5.160.000.000	100	4.780.000.000	100	5.332.628.000	100	4.360.000.000	2.08.2.13.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				6.963.119.106		5.160.000.000		4.780.000.000		5.332.628.000		4.360.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	1	1	6.963.119.106	1	5.160.000.000	1	4.780.000.000	1	5.332.628.000	1	4.360.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				810.000.000		810.000.000		810.000.000		810.000.000		810.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	2	2	810.000.000	2	810.000.000	2	810.000.000	2	810.000.000	2	810.000.000		
2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				2.000.000.000		1.900.000.000		1.500.000.000		900.000.000		900.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2	2	2.000.000.000	2	1.900.000.000	2	1.500.000.000	2	900.000.000	2	900.000.000		
2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				290.000.000		300.000.000		320.000.000		1.447.628.000		450.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	4	4	290.000.000	4	300.000.000	4	320.000.000	4	1.447.628.000	4	450.000.000		
2.13.05.2.01.0007 - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				100.000.000		100.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000		
2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				3.763.119.106		2.050.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	1	1	3.763.119.106	1	2.050.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000		
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				2.303.830.084		2.472.000.000		2.652.500.000		2.560.000.000		2.695.000.000		
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				498.830.054		525.000.000		560.000.000		360.000.000		360.000.000		
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	2,19	2,18	498.830.054	2,18	525.000.000	2,17	560.000.000	2,17	360.000.000	2,17	360.000.000	2.08.2.13.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	14,5	12.6-		11.9-		11.3-		10.7-		10.2-			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				250.000.000		275.000.000		300.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	60	30	250.000.000	15	275.000.000	15	300.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000		
2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				250.000.000		275.000.000		300.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	60	30	250.000.000	15	275.000.000	15	300.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000		
2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				248.830.054		250.000.000		260.000.000		260.000.000		260.000.000		
Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	12	12	248.830.054	12	250.000.000	12	260.000.000	12	260.000.000	12	260.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga				248.830.054		250.000.000		260.000.000		260.000.000		260.000.000		
Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	12	12	248.830.054	12	250.000.000	12	260.000.000	12	260.000.000	12	260.000.000		
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				755.000.000		830.000.000		895.000.000		950.000.000		1.020.000.000		
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	64,45	64,8	755.000.000	65	830.000.000	65,2	895.000.000	65,4	950.000.000	65,6	1.020.000.000	2.08.2.13.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	12,2	12,09		11,98		11,88		11,77		11,67			
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi (Demand Satisfied) (%)	81,6	82		82,2		82,4		82,6		82,8			
2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				154.334.640		170.000.000		185.000.000		200.000.000		215.000.000		
Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	3	3	154.334.640	3	170.000.000	3	185.000.000	3	200.000.000	3	215.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	9	12		12		12		12		12			
2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK				54.445.200		60.000.000		65.000.000		70.000.000		75.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengendalian Program KKBPk	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPk (Laporan)	9	12	54.445.200	12	60.000.000	12	65.000.000	12	70.000.000	12	75.000.000		
2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				99.889.440		110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000		
Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	3	3	99.889.440	3	110.000.000	3	120.000.000	3	130.000.000	3	140.000.000		
2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				240.564.690		270.000.000		290.000.000		310.000.000		330.000.000		
Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	34	34	240.564.690	34	270.000.000	34	290.000.000	34	310.000.000	34	330.000.000		
	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	68	68		68		68		68		68			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				90.564.690		110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000		
Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	68	68	90.564.690	68	110.000.000	68	120.000.000	68	130.000.000	68	140.000.000		
2.14.03.2.02.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				150.000.000		160.000.000		170.000.000		180.000.000		190.000.000		
Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	34	34	150.000.000	34	160.000.000	34	170.000.000	34	180.000.000	34	190.000.000		
2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				260.100.670		280.000.000		300.000.000		300.000.000		325.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1	1	260.100.670	1	280.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	325.000.000		
2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				260.100.670		280.000.000		300.000.000		300.000.000		325.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1	1	260.100.670	1	280.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	325.000.000		
2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				100.000.000		110.000.000		120.000.000		140.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	34	34	100.000.000	34	110.000.000	34	120.000.000	34	140.000.000	34	150.000.000		
2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas				100.000.000		110.000.000		120.000.000		140.000.000		150.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	34	34	100.000.000	34	110.000.000	34	120.000.000	34	140.000.000	34	150.000.000		
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				1.050.000.030		1.117.000.000		1.197.500.000		1.250.000.000		1.315.000.000		
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	8,5	8,7	1.050.000.030	8,9	1.117.000.000	9,09	1.197.500.000	9,28	1.250.000.000	9,3	1.315.000.000	2.08.2.13.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1.001.400.030		967.000.000		1.037.500.000		1.080.000.000		1.135.000.000		
Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	67	13	1.001.400.030	13	967.000.000	13	1.037.500.000	14	1.080.000.000	15	1.135.000.000		
	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan)	0	16,7				33,3				16,7			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	18	20		20		20		20		20			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang)	0	80		100		100		100		100			
	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	481	526		526		550		570		590			
2.14.04.2.01.0014 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				50.000.000		60.000.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	67	13	50.000.000	13	60.000.000	13	75.000.000	14	80.000.000	15	85.000.000		
2.14.04.2.01.0015 - Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL				50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000		
Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan)	0	16,7	50.000.000	33,3	60.000.000	16,7	70.000.000	16,7	80.000.000	16,7	90.000.000		
2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				525.070.875		470.000.000		470.000.000		470.000.000		475.000.000		
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	1	2	525.070.875	2	470.000.000	2	470.000.000	2	470.000.000	2	475.000.000		
2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				35.000.000		35.000.000		37.500.000		40.000.000		45.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	18	20	35.000.000	20	35.000.000	20	37.500.000	20	40.000.000	20	45.000.000		
2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				300.000.000		300.000.000		340.000.000		360.000.000		390.000.000		
Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	481	526	300.000.000	526	300.000.000	550	340.000.000	570	360.000.000	590	390.000.000		
2.14.04.2.01.0020 - Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				41.329.155		42.000.000		45.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang)	0	80	41.329.155	100	42.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				48.600.000		150.000.000		160.000.000		170.000.000		180.000.000		
Terlaksananya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	1	0	48.600.000	1	150.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	1	180.000.000		
	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	1	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.04.2.02.0007 - Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga				48.600.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	0	1	48.600.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000		

4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah

Dalam Rencana Strategis DP3AKB terdapat **11 Program, 20 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan** (terkecuali program penunjang urusan pemerintah daerah yaitu 1 program, 7 kegiatan dan 18 Sub kegiatan) yang akan mendukung program prioritas pembangunan daerah. Sehingga seluruh kegiatan yang ada dalam Renstra 2025-2029 adalah 12 Program, 27 Kegiatan dan 52 Sub Kegiatan.

Tabel 4.4. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.08.2.13.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA				
1.	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dana efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	2.08.02.2.01- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.01.0011- Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
2.	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.01.0004 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KIP Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
3.	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.03.0004 - layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	
4.	2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
5.	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
6.	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran,	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
		perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	2.08.07.2.01.0010 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.03.0009 - koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	
7.	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			2.13.04.2.01.0011 - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	
			2.13.04.2.01.0018 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
8.	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
			2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
			2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
			2.13.05.2.01.0007 - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
			2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
9.	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
			2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	
			2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
10.	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
			2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK	
			2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
			2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
			2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.14.03.2.02.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	
			<b>2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
			<b>2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	
			2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
11.	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	<b>2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	
			2.14.04.2.01.0014 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
			2.14.04.2.01.0015 - Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	
			2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
			2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
			2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
			2.14.04.2.01.0020 - Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
			<b>2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	
			2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
			2.14.04.2.02.0007 - Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	

#### **4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah**

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 18 tahun 2020 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah perlu menyampaikan dan melaporkan hasil kinerja sebagai pertanggungjawaban dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang harus dijabarkan dalam dokumen RENSTRA perangkat daerah sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari perangkat daerah. Adapun kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peran perangkat daerah dinilai atas capaian akuntabilitas kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan sebagai indikator yang tertuang pada dokumen perencanaan perangkat daerah.

Akuntabilitas kinerja pada IKU merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang terkait berhasil atau tidaknya pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan kepada pihak pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Dalam hal akuntabilitas kinerja perangkat daerah DP3AKB Kota Balikpapan adalah antara Kepala Perangkat Daerah dengan Wali Kota Balikpapan. Perwujudan akuntabilitas kinerja tersebut melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui perjanjian kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Wali Kota Balikpapan.

Berkenaan pada dokumen RENSTRA perangkat daerah DP3AKB Kota Balikpapan pada tahun 2025-2030 yang telah disusun, maka perangkat daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sampai dengan akhir periode RENSTRA perangkat daerah. Hal ini memiliki tujuan berupa gambaran tentang ukuran capaian keberhasilan perangkat daerah dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah.

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Dinas P3AKB Kota Balikpapan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian sasaran Dinas P3AKB Kota Balikpapan pada tahun 2025-2030, yang secara khusus mengukur



keberhasilan pembangunan terhadap 3 (tiga) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas P3AKB Kota Balikpapan, antara lain urusan Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Urusan Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa.

Prestasi kinerja Dinas P3AKB kota Balikpapan untuk lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kuantitatif dan kualitatif yang mencerminkan gambaran indikator kinerja program prioritas (*outcome/* hasil) yang menggambarkan berfungsinya keluaran program prioritas jangka menengah yang telah disepakati dalam dokumen RENSTRA Dinas P3AKB Kota Balikpapan untuk periode Tahun 2025-2030.

Penetapan indikator kinerja itu sendiri mempertimbangkan beberapa aspek baik itu aspek kondisi riil saat ini serta mempertimbangkan penjabaran dari indikator kinerja RPJMD Kota Balikpapan pada tahun 2025-2030, hasil penetapan indikator kinerja perangkat daerah dimaksud merupakan point penting nantinya untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui peran perangkat daerah.

Penetapan Indikator Kinerja dari perangkat daerah Dinas P3AKB Kota Balikpapan untuk Tahun 2025-2030 merupakan penjabaran dari indikator kinerja Sasaran yang sudah disepakati bersama sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan pada Tahun 2025-2030 untuk 3 (tiga) urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kab/ Kota melalui peran Perangkat Daerah. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada perangkat daerah Dinas P3AKB Kota Balikpapan pada Tahun 2025-2030 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD kota Balikpapan pada tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian kinerja perangkat daerah. IKU tersebut ditetapkan sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk satu periode kedepan. Berikut ini disajikan tabel IKU dari DP3AKB Kota Balikpapan.

**Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0,176	0,174	0,172	0,170	0,168	0,166	IKU KOTA
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	90.36	90.36	90.37	90.38	90.39	90.5	INDIKATOR TUJUAN OPD
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	75.05	75.06	75.07	75.08	75.09	75.1	IKU OPD
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai	63.75	63.75	63.76	63.77	63.78	63.79	IKU OPD
3	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai	66.6	67.8	68.9	70	70.9	71.9	IKU OPD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berdaya pada Tingkat Provinsi/Nasional	%	81.25	83.00	83.00	85.00	85.00	86.00	IKU OPD
5	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor	71.21	72.00	73.00	74.00	75.00	76.00	IKU OPD

**4.6. Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)**


Indikator Kinerja Kunci, atau yang lebih dikenal dengan singkatan IKK, adalah **seperangkat ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuannya**. Dalam konteks pemerintahan, IKK berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam pemerintahan Indonesia, IKK telah menjadi bagian integral dari sistem perencanaan dan evaluasi kinerja. Hal ini tertuang dalam berbagai regulasi, termasuk Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. IKK tidak hanya sekadar angka atau statistik, melainkan cerminan dari prioritas strategis dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi pemerintah. Indikator ini dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur tentang tingkat pencapaian suatu program atau kebijakan. Berikut adalah Indikator Kinerja Kunci DP3AKB:

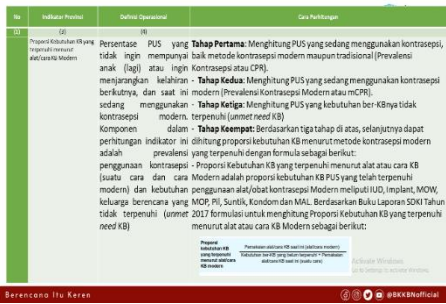
Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	SATUAN	DO	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.08.2.13.2.14.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA												
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI											
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	ukuran yang digunakan untuk menilai kesenjangan antara pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Untuk menghitung IPG, perlu menghitung IPM (laki-laki dan perempuan), kemudian membandingkan nilai IPM perempuan dengan IPM laki-laki untuk melihat perbedaan atau kesenjangan.	$IPG = (IPM \text{ Perempuan} / IPM \text{ Laki-laki}) * 100$	90,34	90,36	90,36	90,37	90,38	90,39	90,5	
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat partisipasi aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, serta dalam pengambilan keputusan	$IDG = (1/3) * (\text{Indeks Keterwakilan Perempuan di Parlemen} + \text{Indeks Perempuan Profesional} + \text{Indeks Kontribusi Pendapatan Perempuan})$	75,04	75,05	75,06	75,07	75,08	75,09	75,1	
3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berdaya pada Tingkat Provinsi/Nasional	%	Definisi operasional kualitas pemberdayaan masyarakat merujuk pada pengukuran dan penilaian tingkat keberdayaan masyarakat melalui indikator-indikator yang spesifik dan terukur. Ini melibatkan identifikasi perubahan positif dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, sebagai hasil dari upaya pemberdayaan.	Jumlah lomba yang dimenangkan oleh lembaga kemasyarakatan / jumlah lomba yang diikuti x 100%	81,25	81,25	83	83	85	85	86	
4	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	Indeks	Pengukuran perbandingan dari kualitas keluarga untuk semua wilayah di Indonesia, serta mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga maju, berkembang atau rentan	<p>Nilai Komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, yaitu</p> <p>(a) Dimensi Ketentraman dengan indikator antara lain (1) kegiatan ibadah; (2) legalitas keluarga; (3) jaminan kesehatan; (4) jaminan keuangan; dan (5) keharmonisan keluarga;</p> <p>(b) Dimensi Kemandirian dengan indikator antara lain (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) keberlangsungan pendidikan; (3) kesehatan keluarga; (4) akses informasi;</p> <p>(c) Dimensi Kebahagiaan dengan indikator antara lain (1) interaksi keluarga; (2) interaksi sosial</p> <p>Formula iBangga:</p> $iBangga = 1/3 (\text{Indeks ketentraman} + \text{Indeks kemandirian} + \text{Indeks kebahagiaan}) \times 100$	65,4	66,6	67,8	68,9	70	70,9	71,9	
5	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	hasil akhir dari evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) di lingkungan perangkat daerah, yang mencerminkan sejauh mana perangkat daerah tersebut telah menerapkan manajemen kinerja yang efektif	Penilaian oleh Inspektorat	64,64	71,21	72	73	74	75	76	

NO	INDIKATOR	SATUAN	DO	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
6	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	ukuran yang menggambarkan pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	IPA dihitung berdasarkan pada lima klaster hak anak, yang mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA). IPA kemudian dihitung dengan menggabungkan nilai IPHA dan IPKA, biasanya dalam bentuk persentase.	63,74	63,75	63,75	63,76	63,77	63,78	63,79	
7	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	indikator kuantitatif yang mengukur tingkat pencapaian perlindungan terhadap anak-anak dalam situasi dan kondisi tertentu yang membutuhkan perhatian khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi, dan anak dari kelompok terpinggirkan, dengan tujuan menilai keberhasilan kebijakan dan sebagai dasar penyusunan strategi perlindungan khusus anak	indikator untuk mengukur capaian perlindungan khusus bagi anak yang berada dalam situasi khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, atau anak terlantar, dan disusun mengacu pada Klaster V Konvensi Hak Anak (KHA) (dihitung dan ditetapkan oleh BPS)	79,33	79,55	79,55	79,66	79,74	79,89	80,5	
8	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan) adalah perbandingan antara jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan kasus TPPO dengan jumlah total penduduk perempuan, dinyatakan dalam satuan per 100.000 penduduk perempuan. Ini mengukur tingkat kejadian kekerasan terhadap perempuan dan perdagangan perempuan dan anak, serta mempermudah perbandingan antar wilayah atau periode waktu yang berbeda.	<div><div>Jumlah Perempuan yang mengalami Kekerasan</div><div>Jumlah Penduduk Perempuan</div><div>X 100.000</div></div>	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai dengan Regulasi	%	persentase jumlah kelurahan dalam suatu wilayah yang telah melaksanakan proses evaluasi perkembangan (termasuk penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan) sesuai dengan instrumen dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 81 Tahun 2015.	<div><div>Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai dengan Regulasi</div><div>seluruh kelurahan</div><div>x 100%</div></div>	100	100	100	100	100	100	100	
10	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	angka yang menggambarkan tingkat pemenuhan hak-hak anak di suatu daerah atau negara, yang dihitung berdasarkan skor dari sejumlah indikator yang relevan, yang mengukur berbagai aspek pemenuhan hak anak. IPHA dihitung dengan menggabungkan skor masing-masing indikator dan mengonversinya menjadi satu angka komposit yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi atau perbandingan antar daerah atau waktu.	rumus atau metode untuk mengukur capaian pemenuhan hak-hak anak yang terkelompok dalam empat klaster Konvensi Hak Anak (KHA), yaitu hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; serta pendidikan dan pemanfaatan waktu luang (ditetapkan oleh BPS)	61,27	61,28	61,28	61,29	61,3	61,31	61,32	

NO	INDIKATOR	SATUAN	DO	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	hasil pengukuran kuantitatif yang mengukur tingkat kepuasan aparatur internal (pegawai) suatu perangkat daerah terhadap kinerja pelayanan internalnya sendiri	Hasil Survey Internal	77	77	78	79	80	81	82	
12	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	Definisi operasional Persentase ARG pada belanja langsung APBD adalah ukuran yang menunjukkan persentase dari alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan atau proyek tertentu (ARG - Anggaran Rinci Kegiatan) terhadap total belanja langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).	<div>Persentase ARG = <math>\frac{\text{Nilai ARG}}{\text{Total Belanja Langsung}} \times 100\%</math></div>	40,02	41	41	42	43	44	45	
13	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase	Persentase keluarga yang berpartisipasi dalam program ketahanan keluarga yang meliputi aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.	<div><math display="block">P_K = \left( \frac{K_P}{K_T} \right) \times 100\%</math><p>Keterangan:</p><ul style="list-style-type: none"><li>• <math>P_K</math> = Persentase keluarga yang berpartisipasi</li><li>• <math>K_P</math> = Jumlah keluarga yang berpartisipasi</li><li>• <math>K_T</math> = Total jumlah keluarga</li></ul></div>	8,5	8,5	8,7	8,9	9,09	9,28	9,3	
14	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	1. Rata – rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15-49 tahun) sumber: BPS, Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa) 2. Jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya jika dapat melampaui masa melahirkan anak dengan mengikuti pola ASFR saat ini (SDKI 2007, pp.49)	<div>Dihitung oleh Kemendukbangga dan BPS</div> <div><math display="block">TFR = \sum (ASFR_x \times Interval)</math><p>Dimana :</p><p>* ASFR<sub>x</sub> adalah tingkat kelahiran spesifik umur untuk kelompok usia x</p><p>* Interval adalah rentang usia yang digunakan dalam perhitungan (biasanya 5 tahun, misal 15-19 dsb)</p></div>	2,19	2,19	2,18	2,18	2,17	2,17	2,17	
15	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kota	%	serangkaian kegiatan terstruktur yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak terkait untuk mendukung, membimbing, dan memperkuat kapasitas lembaga- lembaga kemasyarakatan di tingkat kota agar mampu secara efektif melaksanakan fungsinya, mewujudkan aspirasi masyarakat, serta menjadi mitra pembangunan yang mandiri dan berdaya	<div><math display="block">\frac{\text{Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi}}{\text{jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan}} \times 100\%</math></div>	0	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	DO	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET											
						2025	2026	2027	2028	2029	2030												
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)											
16	Persentase Data Gender dan Anak yang Terpilah	%	data gender dan anak secara konsisten dan berkelanjutan, diperlukan peraturan sebagai payung hukum yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan daerah. Keberadaan peraturan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap penyelenggaraan sistem data gender dan anak sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan/program/kegiatan yang responsif gender	<table><tr><td>Jumlah Data Gender dan Anak yang terpilah yang tersedia</td><td rowspan="2">x 100%</td></tr><tr><td>Jumlah Data Gender Anak yang seharusnya disediakan</td></tr></table>	Jumlah Data Gender dan Anak yang terpilah yang tersedia	x 100%	Jumlah Data Gender Anak yang seharusnya disediakan	0	0	26	27	29	30	31									
Jumlah Data Gender dan Anak yang terpilah yang tersedia	x 100%																						
Jumlah Data Gender Anak yang seharusnya disediakan																							
17	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Indeks	pengukuran kuantitatif dan kualitatif terhadap pendapat masyarakat mengenai tingkat kepuasan mereka terhadap berbagai layanan yang diberikan PUSPAGA, dengan membandingkan harapan mereka dengan kinerja pelayanan yang diterima	Hasil Survei kepada pengguna	89,94	89,95	89,96	89,96	89,98	90	90												
18	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persentase	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) adalah proporsi wanita usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi modern pada waktu tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase. Ini mengukur prevalensi penggunaan metode kontrasepsi modern dalam suatu populasi, yang mencakup semua metode kontrasepsi yang dianggap modern, seperti pil kontrasepsi, alat kontrasepsi dalam rahim (IUD), kondom, dan metode lainnya.	Dihitung oleh Kemendukbangga dan BPS <table><tr><td>Jumlah peserta KB Aktif Modern</td><td rowspan="2">x100%</td></tr><tr><td>Jumlah Pasangan Usia Subur</td></tr></table>	Jumlah peserta KB Aktif Modern	x100%	Jumlah Pasangan Usia Subur	64,45	64,45	64,8	65	65,2	65,4	65,6									
Jumlah peserta KB Aktif Modern	x100%																						
Jumlah Pasangan Usia Subur																							
19	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk perempuan usia kerja (15 tahun ke atas), yang menunjukkan sejauh mana perempuan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi di pasar tenaga kerja	dihitung oleh BPS  Rumus TPAK Perempuan = (Jumlah Angkatan Kerja Perempuan / Jumlah Penduduk Usia Kerja Perempuan) x 100% 	52,71	52,71	53,17	53,4	53,63	53,86	54,07												
20	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	1. Persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB (Statistik Rutin). 2. Wanita usia subur yang tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi namun menginginkan penundaan kehamilan (penjarangan) atau berhenti sama sekali (pembatasan) SDKI 2007, pp.98).	Dihitung oleh Kemendukbangga dan BPS <table><tr><td>PUS bukan peserta KB (IAT+TIAL)</td><td rowspan="2">x100%</td></tr><tr><td>Total PUS</td></tr><tr><td colspan="2">Keterangan :</td></tr><tr><td colspan="2">IAT : Ingin Anak Ditunda (penjarangan)</td></tr><tr><td colspan="2">TIAL : Tidak Ingin Anak Lahir (Pembatasan)</td></tr><tr><td colspan="2">Total PUS : Jumlah seluruh PUS</td></tr></table>	PUS bukan peserta KB (IAT+TIAL)	x100%	Total PUS	Keterangan :		IAT : Ingin Anak Ditunda (penjarangan)		TIAL : Tidak Ingin Anak Lahir (Pembatasan)		Total PUS : Jumlah seluruh PUS		12,2	12,2	12,09	11,98	11,88	11,77	11,67	
PUS bukan peserta KB (IAT+TIAL)	x100%																						
Total PUS																							
Keterangan :																							
IAT : Ingin Anak Ditunda (penjarangan)																							
TIAL : Tidak Ingin Anak Lahir (Pembatasan)																							
Total PUS : Jumlah seluruh PUS																							

NO	INDIKATOR	SATUAN	DO	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
21	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	Angka kelahiran selama setahun per 1000 wanita pada kelompok usia 15-19 Tahun. Angka ini dapat digunakan untuk membedakan fertilitas umur MUD.	<p>Dihitung oleh Kemendukbangga dan BPS</p> $ASFR_{(15-19)} = \frac{K_{(15-19)}}{P_{(15-19)}} \times 1000$ <p>P15-19 : Jumlah Perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun K15-19 : Jumlah Kelahiran pada kelompok umur 15-19 tahun</p>	14,5	13.5-	12.6-	11.9-	11.3-	10.7-	10.2-	
22	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi (Demand Satisfied)	%	Persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, dan saat ini sedang menggunakan kontrasepsi modern. Komponen dalam perhitungan indikator ini adalah prevalensi penggunaan kontrasepsi (suatu cara dan cara modern) dan kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi (unmet need KB).	<p>Dihitung oleh Kemendukbangga dan BPS</p> 	81,6	81,8	82	82,2	82,4	82,6	82,8	
23	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	%	Jumlah perempuan yang menjadi anggota legislative/DPRD provinsi dan kabupaten/kota dibagi jumlah seluruh anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dan dinyatakan dalam satuan persen (%)	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang menjadi anggota legislative}}{\text{jumlah seluruh anggota DPRD kabupaten/kota}} \times 100\%$	29,87	29,87	30	32,5	35	37,5	40	
24	Presentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di Lembaga Eksekutif (eselon II)	%	Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di lembaga pemerintahan pada tingkat eksekutif (eselon I dan II) terhadap keseluruhan pengambil keputusan di lembaga eksekutif setara eselon I dan II	<p>Rumus:</p> $P\text{ KPLE} = \frac{J\text{PLE}}{J\text{SPLE}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>P KPLE : Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II)</p> <p>JPLE : Jumlah perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II)</p> <p>JSPLE : Jumlah seluruh pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II)</p>	34,38	34,38	35	35	36	36	36	

NO	INDIKATOR	SATUAN	DO	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
25	Proporsi / Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri / Berkelanjutan	%	Kampung KB Mandiri adalah satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu di mana terdapat peningkatan indikator Program Bangga Kencana dan keterpaduan dengan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.	perhitungan/data lapangan	50,4	50,4	51,2	52	52,8	53,5	54,2	
26	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	Indeks Lansia Berdaya adalah indeks komposit yang menggambarkan tentang lansia yang memenuhi indikator dari dimensi lansia tangguh yaitu dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi sosial kemasyarakatan, dimensi intelektual, dimensi vokasional dan dimensi lingkungan.	tidak ada (dihitung oleh BPS)	59,6	59,6	60,4	61,2	61,9	62,7	63,4	
27	Presentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	%	Persentase perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) /Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi /DPRD kabupaten/kota terhadap keseluruhan anggota DPR atau DPRD di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.	<p>Rumus:</p> <div><math display="block">P\text{ KPDK} = \frac{JPDK}{JSDK} \times 100\%</math></div> <p>Keterangan:</p> <p>P KPDK : Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota</p> <p>JPDK : Jumlah perempuan anggota DPRD Kabupaten/Kota</p> <p>JSDK : Jumlah seluruh anggota DPRD Kabupaten/Kota</p>	26,67	26,67	28	30,5	33	35,5	38	
28	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	Indeks	Merupakan Indeks komposit yang menggambarkan pengasuhan orang tua/keluarga kepada anaknya/anggota keluarga yang berusia remaja. Indeks pengasuhan remaja dihitung dengan pendekatan agregat indikator, di mana setiap indikator dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh indikator dan masing-masing indikator memiliki tingkat kepentingan bobot yang sama.	<p>dihitung oleh BPS</p> <p>dengan : indikator ke-1 dan : bobot ke-1 di mana : Adapun bobot untuk masing masing indikator adalah : dengan = banyaknya indikator.</p> <p>V1 : memiliki legalitas diri, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-24 tahun) memiliki akta lahir.</p> <p>V2 : akses terhadap pendidikan, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-18 tahun) tidak ada yang putus sekolah.</p> <p>V3 : terbebas dari pekerjaan, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-14 tahun) tidak/belum bekerja.</p> <p>V4 : memiliki jaminan kesehatan, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-24 tahun) memiliki asuransi kesehatan (pemerintah/swasta).</p> <p>V5: memiliki jaminan masa depan, adalah persentase keluarga punya remaja yang memiliki aset tabungan (uang kontan/rekening aktif), emas/perhiasan (minimal 10 gram), dan atau hewan ternak yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam 3 (tiga) bulan ke depan.</p> <p>V6 : kecukupan gizi, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap anggota keluarga makan "makanan beragam" (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari.</p> <p>V7 : kondisi sehat, adalah persentase keluarga punya remaja di mana tidak ada anggota keluarga yang memiliki penyakit kronis dan atau disabilitas.</p> <p>V8 : akses terhadap sumber informasi, adalah persentase keluarga punya remaja di mana terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga mengakses informasi dari media online (internet).</p>	91,7	91,7	92,1	92,5	92,9	93,3	93,6	



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinas P3AKB) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yang memuat penjabaran target capaian Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas P3AKB Kota Balikpapan dalam mendukung Visi dan Misi Wali Kota Balikpapan Periode Tahun 2025-2029.

Dengan disusunnya RENSTRA Dinas P3AKB Kota Balikpapan pada periode tahun 2025-2029 ini, Dinas P3AKB Kota Balikpapan telah memiliki pedoman dan acuan terkait sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas P3AKB Kota Balikpapan, bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui penetapan strategi dan kebijakan serta penentuan program prioritas, kegiatan dan sub kegiatan serta penetapan target kinerja Dinas P3AKB dalam tahun 2025-2029 termasuk penetapan jenis kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif yang dibutuhkan dalam tahun 2025-2029.

Rencana Strategis ini dapat dipakai sebagai pedoman dasar dalam pengambilan langkah dan keputusan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas P3AKB Kota Balikpapan selama 5 (lima) tahun ke depan secara terencana, namun tidak menutup kemungkinan dapat dilakukannya revisi penyesuaian terhadap dokumen yang ada dengan pertimbangan perubahan kebijakan atau terdapatnya situasi dan kondisi yang memungkinkan bagi Dinas P3AKB Kota Balikpapan maupun kondisi daerah yang memaksa dilakukannya penyesuaian ulang terhadap dokumen RENSTRA dimaksud, dengan catatan tetap dikoordinasikan dan disinergikan dengan dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENSTRA perangkat daerah Dinas P3AKB Kota Balikpapan tahun 2025-2029 ini tidak sempurna serta tidak tertutup kemungkinan masih banyak kelemahan/kekurangan, sehingga masukan saran dan pendapat dalam hal ini sangat diperlukan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta membantu dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas P3AKB Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 ini sebagai tindak lanjut dari penjabaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029. Semoga dapat bermanfaat sebagai acuan pedoman dalam menyusun perencanaan tahunan dan bahan evaluasi penilaian kinerja dari perangkat daerah Dinas P3AKB Kota Balikpapan terkait 3 (tiga) bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah DP3AKB Kota Balikpapan.

Balikpapan, 10 Sptember 2025  
Kepala DP3AKB Kota Balikpapan

**Ir. Heria Prisni**

# LAMPIRAN

DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA					26,603,830,054		26,869,868,000		28,213,361,000		28,777,628,000		29,640,957,000	
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					3,538,919,542		3,767,868,000		4,100,000,000		4,220,000,000		4,385,000,000	
I	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	40,02%	41%	152,014,700	42%	185,000,000	43%	250,000,000	44%	270,000,000	45%	285,000,000	Inment No 2 tahun 2025
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	52,71%	53.17%		53.40%		53.63%		53.86%		54.07%		
1	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang mendapatkan advokasi/pendampingan PPRG (OPD) (%)	N/A	18%	67,826,200	21%	100,000,000	21%	150,000,000	21%	160,000,000	21%	165,000,000	
1	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan (lembaga)	N/A	3	67,826,200	5	100,000,000	5	150,000,000	5	160,000,000	5	165,000,000	tag : kespro
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota (kegiatan)	N/A	2	84,188,500	2	85,000,000	2	100,000,000	2	110,000,000	2	120,000,000	
2	2.08.02.2.02.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (lembaga)	2	2	84,188,500	2	85,000,000	2	100,000,000	2	110,000,000	2	120,000,000	wajib diambil krn masuk pemutakhiran (tag : ARG ASTACITA)
II	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Gender dan Anak yang terpilah (%)	N/A	26%	62,493,400	27%	65,000,000	29%	75,000,000	30%	85,000,000	31%	95,000,000	
3	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Terlatih Penyediaan Data Terpilah (OPD)	29	34	62,493,400	34	65,000,000	34	75,000,000	34	85,000,000	34	95,000,000	

NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (dokumen)	1	1	62,493,400	1	65,000,000	1	75,000,000	1	85,000,000	1	95,000,000	dokumen IPG atau dokumen profil anak => Tagging ARG
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	N/A	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	220,000,000	100%	230,000,000	100%	240,000,000	
4	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (kegiatan)	N/A	2	100,000,000	2	100,000,000	2	120,000,000	2	130,000,000	2	140,000,000	
4	Kerjasama Para Pihak Dalam Pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)	2	1	100,000,000	2	100,000,000	2	120,000,000	2	130,000,000	2	140,000,000	Tag : Kespro
5	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif (%)	100	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	
5	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	38	36	100,000,000	34	100,000,000	32	100,000,000	30	100,000,000	28	100,000,000	Tag: kespro
IV	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	61.27	61.28	1,100,000,000	61.29	1,190,000,000	61.30	1,340,000,000	61.31	1,350,000,000	61.32	1,360,000,000	
6	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang dibina (lembaga)	96.55%	97.24%	1,100,000,000	97.93%	1,190,000,000	98.62%	1,340,000,000	905	1,350,000,000	100%	1,360,000,000	
6	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)	1	1	300,000,000	1	320,000,000	1	340,000,000	1	350,000,000	1	360,000,000	dokumen hasil evaluasi mandiri = > tdk di tagging (null)

NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7	Pendampingan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (lembaga)	979	982	800,000,000	984	870,000,000	986	1,000,000,000	988	1,000,000,000	990	1,000,000,000	lembaga yang masuk dlm Gugus tugas (puskesmas, PPATBM, kelurahan, Sekolah Ramah Anak, forum anak, RIRA)=> tag: kespro
V	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	79.33	79.55	1,729,411,442	79.66	1,820,000,000	79.74	1,890,000,000	79.89	1,960,000,000	80.5	2,055,000,000	
7	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan)	36	36	779,411,442	36	800,000,000	36	825,000,000	36	850,000,000	36	875,000,000	34 =Lautan RT; 1 bimtek PPATBM; 1 workshop pemerhati anak
8	Peningkatan Kapasitas kepada SDM yang Terkait Langsung Pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (orang)	2236	2411	779,411,442	2416	800,000,000	2596	825,000,000	2606	850,000,000	2616	875,000,000	tdk ditagging (null)
8	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penyelesaian Penanganan Klien pada UPTD PPA (%)	96.36%	96.5	750,000,000	96.6	800,000,000	96.7	825,000,000	97	850,000,000	97.2	900,000,000	
9	2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (anak)	182	175	750,000,000	170	800,000,000	165	825,000,000	160	850,000,000	155	900,000,000	Tag: kespro
9	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (kegiatan)	3	3	200,000,000	3	220,000,000	3	240,000,000	3	260,000,000	3	280,000,000	Manajemen Kasus, Simponi, Mediator
10	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus (dokumen) tingkat daerah kabupaten/kota (dokumen)	1 dokumen	1	200,000,000	1	220,000,000	1	240,000,000	1	260,000,000	1	280,000,000	bentuk dokumen laporan tahunan(manajemen kasus, simphony dsb) => Tag: Posyandu Astacita

NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
VI	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	89.94	89.96	295,000,000	89.96	307,868,000	89.98	325,000,000	90.00	325,000,000	90.00	350,000,000	
10	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase keluarga yang mendapatkan layanan di Puspaga (%)	N/A	4.99%	295,000,000	5.0%	307,868,000	5.01%	325,000,000	5.02%	325,000,000	5.03%	350,000,000	
11	Layanan Konsultasi dan Konseling Keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten / Kota (Keluarga)	12808	12830	295,000,000	12850	307,868,000	12870	325,000,000	12,890	325,000,000	12,910	350,000,000	tdk ditagging (null)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					2,303,830,084		2,472,000,000		2,652,500,000		2,560,000,000		2,695,000,000	
VII	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2.19	2.18	498,830,054	2.18	525,000,000	2.17	560,000,000	2.17	360,000,000	2.17	360,000,000	
		Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	14.5	12.6		11.9		11.3		10.7		10.2		
11	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase sekolah siaga kependudukan yang terbentuk (%)	29%	31%	250,000,000	19%	275,000,000	23%	300,000,000	8%	100,000,000	9%	100,000,000	total sekolah di Bpn : 315 yg sdh terbentuk SSK 189 (127 SD/MI, 62 SMP/Mts)
12	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI danSLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (dokumen)	60	30	250,000,000	15	275,000,000	15	300,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	Tag : bangga kencana
12	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan data yang dikumpulkan/diupdate tepat waktu (%)	100%	100%	248,830,054	100%	250,000,000	100%	260,000,000	100%	260,000,000	100%	260,000,000	data pelayanan KB,faskes dan Dalap dr PKB
13	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (dokumen)	12	12	248,830,054	12	250,000,000	12	260,000,000	12	260,000,000	12	260,000,000	data dari kader sub PPKBD, dalap => tag Stunting, Bangga Kencana, Pembangunan Keluarga

NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
VIII	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (%)	64.45	64.8	755,000,000	65	830,000,000	65.2	895,000,000	65.4	950,000,000	65.6	1,020,000,000	thn 2024 sdh melebihi target nasional 63.21 (target per tahun adalah mrp proyeksi BKKBN)
		Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)	12.20%	12.09%		11.98%		11.88%		11.77%		11.67%		unmeetneed tetap, PUS bertambah 1000 org/tahun (indikator negatif, semakin turun semakin baik)
		Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi (Demand Satisfied) (%)	81.60%	82.00%		82.20%		82.40%		82.60%		82.80%		
13	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah PUS Peserta KB Aktif (orang )	71,374	77,374	154,334,640	83,374	170,000,000	89,374	185,000,000	95,374	200,000,000	101,374	215,000,000	
14	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (laporan)	9	12	54,445,200	12	60,000,000	12	65,000,000	12	70,000,000	12	75,000,000	6 laporan pengendalian per kecamatan, 3 laporan kegiatan bidang KB >> 12 laporan berupa 2 kali laporan kegiatan di 6 kecamatan => tag kespro, bangga kencana
15	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (dokumen)	3	2	99,889,440	2	110,000,000	2	120,000,000	2	130,000,000	2	140,000,000	media cetak, media elektronik, media ruang => Tagging : pembangunan keluarga, bangga kencana, kespro ' 2024-2025 ada dukungan DAK
14	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)	Jumlah Kelompok IMP terbina oleh PKB (kelompok)	34 Kelompok IMP	34	240,564,690	34	270,000,000	34	290,000,000	34	310,000,000	34	330,000,000	kelompok di 34 Kelurahan

NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
16	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (orang)	1,020	68	90,564,690	68	110,000,000	68	120,000,000	68	130,000,000	68	140,000,000	Jumlah kader tetap, yang berubah hanya materi dan lokasi pembinaan = > <b>tagging Kespro, bangga kencana</b> ; 2024 baseline krn ada anggaran DAK, shg kader yg dibiayai transportnya sejumlah 1020
17	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (PembangunanKeluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (laporan)	34	34	150,000,000	34	160,000,000	34	170,000,000	34	180,000,000	34	190,000,000	tiap kelurahan = > <b>tagging Kespro, bangga kencana</b>
15	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kab/Kota	Persentase Kepesertaan KB MKJP (%)	30.2%	31.5%	260,100,670	31.6%	280,000,000	31.7%	300,000,000	31.8%	300,000,000	31.9%	325,000,000	
18	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termsuk jaringan dan jejaringnya (laporan)	1	1	260,100,670	1	280,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	325,000,000	<b>Tagging : kespro, percepatan penurunan stunting, stunting</b>
16	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	Jumlah kelurahan yang berperan dalam pelaksanaan program bangga kencana (kelurahan)	34	34	100,000,000	34	110,000,000	34	120,000,000	34	140,000,000	34	150,000,000	peran kelurahan di Bpn



NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Proporsi /Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri/berkelanjutan	50%	51.2%		52%		52.8%		53.5%		54.2%		
19	Pelaksanaan dan pengelolaan Program bangga kencana di kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah kampung keluarga berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan pengelolaan Program bangga kencana di kampung Keluarga Berkualitas (kampung)	34	34	100,000,000	34	110,000,000	34	120,000,000	34	140,000,000	34	150,000,000	kampung KB tiap kelurahan => Tag : kespro, bangga kencana, pengendalian pelaksanaan
IX	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan/ poktan (%)	8.5	8.7	1,050,000,030	8.9	1,117,000,000	9.09	1,197,500,000	9.28	1,250,000,000	9.3	1,315,000,000	data SIGA 2024 (157.927 KK); 1 kali pembinaan =15 org/klmp; pembinaan dlm 1 thn 10 kali = 150 org (BKB, BKL,BKR,UPPKA) berarti 1 thn = 150x4 = 600 org ; PIK-R = 20 org/klmp; dlm 1 thn 10 kali= 200 org; 1342 org di thn 2024 adalah anggota poktan
17	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok kegiatan yang aktif (%)	94.3	94.8	1,001,400,030	95.3	967,000,000	95.8	1,037,500,000	96.29	1,080,000,000	96.78	1,135,000,000	POKTAN YG ADA (404) => BKB= 137; BKR=67; BKL=77; UPPKA = 57; PIK-R 66
		Indeks Lansia Berdaya	58.8	60.4		61.2		61.9		62.7		63.4		
		Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki remaja	91.3	92.1		92.5		92.9		93.3		93.6		
20	Sub Kegiatan Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (%)	N/A	16.7	50,000,000	33.3	60,000,000	16.7	70,000,000	16.7	80,000,000	16.7	90,000,000	1 Sekolah lansia/kecamatan => tag : bangga kencana

NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
21	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	1	2	525,070,875	2	470,000,000	2	470,000,000	2	470,000,000	2	475,000,000	Laporan peringatan harganas dan laporan genre => <b>Tagging : pembangunan keluarga' BKR</b>
22	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahter aan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (unit)	18	20	35,000,000	20	35,000,000	20	37,500,000	20	40,000,000	20	45,000,000	BKB Kit Stunting => <b>Tagging: pembangunan keluarga</b>
23	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (orang)	481	526	300,000,000	526	300,000,000	550	340,000,000	570	360,000,000	590	390,000,000	jumlah kader : 2023=371; 2024=481; 2025=456 => <b>Tagging: pembangunan keluarga</b>
24	Sub Kegiatan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (orang)	N/A	80	41,329,155	100	42,000,000	100	45,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	=> <b>Tagging: pembangunan keluarga</b>
25	Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (keluarga)	67	12	50,000,000	13	60,000,000	13	75,000,000	14	80,000,000	15	85,000,000	<b>sasarannya adalah BKR; 1 BKR = 20 klrg yg memiliki remaja</b>

NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
18	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase organisasi yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan keluarga (%)	N/A	20%	48,600,000	20%	150,000,000	20%	160,000,000	20%	170,000,000	20%	180,000,000	BKKBN, Dinkes, Diknas, Dinsos, DPMPD, KUA, PKK, Karang Taruna, LPM, Org Keagamaan, Forum anak, forum genre, perusahaan, media lokal, perguruan tinggi
26	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (laporan)	N/A	1	48,600,000	1	50,000,000	1	60,000,000	1	70,000,000	1	80,000,000	Tag: Kespro, Bangsa Kencana, Pembangunan Keluarga
27	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	1	0	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				7,257,799,506		5,455,000,000		5,130,000,000		5,687,628,000		4,735,000,000	
X	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kota (4 lembaga) (%)	N/A	100%	6,963,119,106	100%	5,160,000,000	100%	4,780,000,000	100%	5,332,628,000	100%	4,360,000,000	
19	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang Aktif (lembaga)	4	4	6,963,119,106	4	5,160,000,000	4	4,780,000,000	4	5,332,628,000	4	4,360,000,000	

NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
28	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (dokumen)	2	2	810,000,000	2	810,000,000	2	810,000,000	2	810,000,000	2	810,000,000	kelurahan + karang taruna => tag: Posyandu Astacita
29	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (lembaga)	2	2	2,000,000,000	2	1,900,000,000	2	1,500,000,000	2	900,000,000	2	900,000,000	LPM,Posyandu => tag: Posyandu Astacita, (tahun 2028 asumsi transport kader posyandu sdh dialihkan ke DKK)
30	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (laporan)	4	4	290,000,000	4	300,000,000	4	320,000,000	4	1,447,628,000	4	450,000,000	TTG Pusat,Provinsi,Kota ,posyantek (tahun 2029 sebagai tuan rmh TTG Provinsi) => Null
31	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (laporan)	1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	150,000,000	1	175,000,000	1	200,000,000	Tdk ada tagging (null)
32	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (dokumen)	1	1	3,763,119,106	1	2,050,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	thn 2026 Perpindahan kantor PKK ; Interior Kantor PKK, Pengadaan Sapras PKK, Transport Kader PKK RT (12 bulan), PKK Kelurahan , PKK kecamatan ==> tdk ditagging (null)
XI	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi (%)	100%	100%	294,680,400	100%	295,000,000	100%	350,000,000	100%	355,000,000	100%	375,000,000	

NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
20	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kelurahan/Desa yang dibina dan diawasi (kelurahan)	34	34	294,680,400	34	295,000,000	34	350,000,000	34	355,000,000	34	375,000,000	
33	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (dokumen)	34	34	125,000,000	34	125,000,000	34	175,000,000	34	175,000,000	34	175,000,000	Tag: Geopark
34	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (dokumen)	1	1	169,680,400	1	170,000,000	1	175,000,000	1	180,000,000	1	200,000,000	tdk ditagging (null)
PENUNJANG URUSAN					13,503,280,922		15,175,000,000		16,330,861,000		16,310,000,000		17,825,957,000	
XII	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77	78	13,503,280,922	79	15,175,000,000	80	16,330,861,000	81	16,310,000,000	82	17,825,957,000	
21	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKJIP	64.64	65	19,924,100	65.5	-	66	-	66.5	-	67	-	
35	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	1	1	19,924,100	0	-	0	-	0	-	0	-	
22	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80.29	75	10,000,075,900	75	11,200,000,000	76	11,600,000,000	77	11,800,000,000	78	12,185,957,000	
36	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (OB)	431 OB	840	10,000,075,900	840	11,200,000,000	840	11,600,000,000	840	11,800,000,000	840	12,185,957,000	
23	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (orang bulan)	N/A	75	98,737,500	75	100,000,000	76	150,000,000	77	100,000,000	78	255,000,000	
37	Pengadaan Pakaian Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (paket)	N/A	1	37,537,500	-	-	1	50,000,000	-	-	1	55,000,000	
38	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	N/A	4	61,200,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	20	200,000,000	
24	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.38	75	1,671,093,850	75	1,855,000,000	76	1,985,000,000	77	2,145,000,000	78	2,330,000,000	
39	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20 paket	20	582,974,075	20	600,000,000	20	670,000,000	20	725,000,000	20	750,000,000	
40	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	N/A	2	28,900,610	2	30,000,000	2	35,000,000	2	40,000,000	2	45,000,000	

NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
41	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	10	8	449,815,610	12	550,000,000	12	600,000,000	12	650,000,000	12	700,000,000	
42	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	3	3	108,640,820	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	
43	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu (laporan)	N/A	12	18,793,900	12	20,000,000	12	25,000,000	12	30,000,000	12	35,000,000	
44	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	69	70	361,968,835	75	455,000,000	75	455,000,000	80	500,000,000	85	600,000,000	
45	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	N/A	4	120,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	Dokumen yang dihasilkan dari penataan arsip (arsipaktif, usul musnah, realisasi anggaran musnah, arsip inaktif)
25	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.38	75	836,027,000	75	850,000,000	76	1,440,861,000	77	1,000,000,000	78	1,600,000,000	
46	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit)	6 unit	6	836,027,000	6	850,000,000	6	1,000,000,000	6	1,000,000,000	6	1,050,000,000	
47	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	N/A	0	-	-	-	4	440,861,000		-	6	550,000,000	2028 1 unit mobil 3 motor; 2030 1 unit mobil 5 unit motor
26	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.38	75	150,484,072	75	220,000,000	76	195,000,000	77	220,000,000	78	275,000,000	
48	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12 laporan	12	55,329,072	12	60,000,000	12	65,000,000	12	70,000,000	12	75,000,000	

NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
49	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	13 laporan	13	95,155,000	13	160,000,000	13	130,000,000	13	150,000,000	13	200,000,000	tahun 2027 ada agenda pemusnahan BMD elektronik setelah ada persetujuann penghapusan
27	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.38	75	726,938,500	75	950,000,000	76	960,000,000	77	1,045,000,000	78	1,180,000,000	
50	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	58 unit	56	452,866,000	56	550,000,000	56	575,000,000	60	650,000,000	60	700,000,000	2 Mobil di kembalikan ke BKAD, ketambahan 1 unit mobil baru jika ada pengadaan
51	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	144 unit	150	133,246,000	155	150,000,000	160	160,000,000	165	170,000,000	170	180,000,000	
52	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	2 unit	2	140,826,500	2	250,000,000	2	225,000,000	2	225,000,000	2	300,000,000	





### 1.1 **Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan kebijakan pemerintah kota dalam periode tahun 2025-2029 tersebut ditetapkan dan dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah guna mengantisipasi berbagai isu-isu yang diperkirakan terjadi baik yang berupa tantangan, kendala maupun peluang sesuai dengan potensi, kewenangan serta kemampuan yang dimiliki dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan, sedangkan penyusunan Renstra PD disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Renstra PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra PD terdiri dari tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan Renstra PD, penyusunan rancangan Renstra PD, penyusunan rancangan akhir Renstra PD dan penetapan Renstra PD.

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan. (RKT) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kota Balikpapan dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2025-2029. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra PD.

Renstra merupakan komitmen DPPR Kota Balikpapan yang digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kota Balikpapan di bidang pertanahan dan penataan ruang serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi DPPR Kota Balikpapan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Balikpapan, yaitu “Balikpapan Kota Global Nyaman Untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman”.

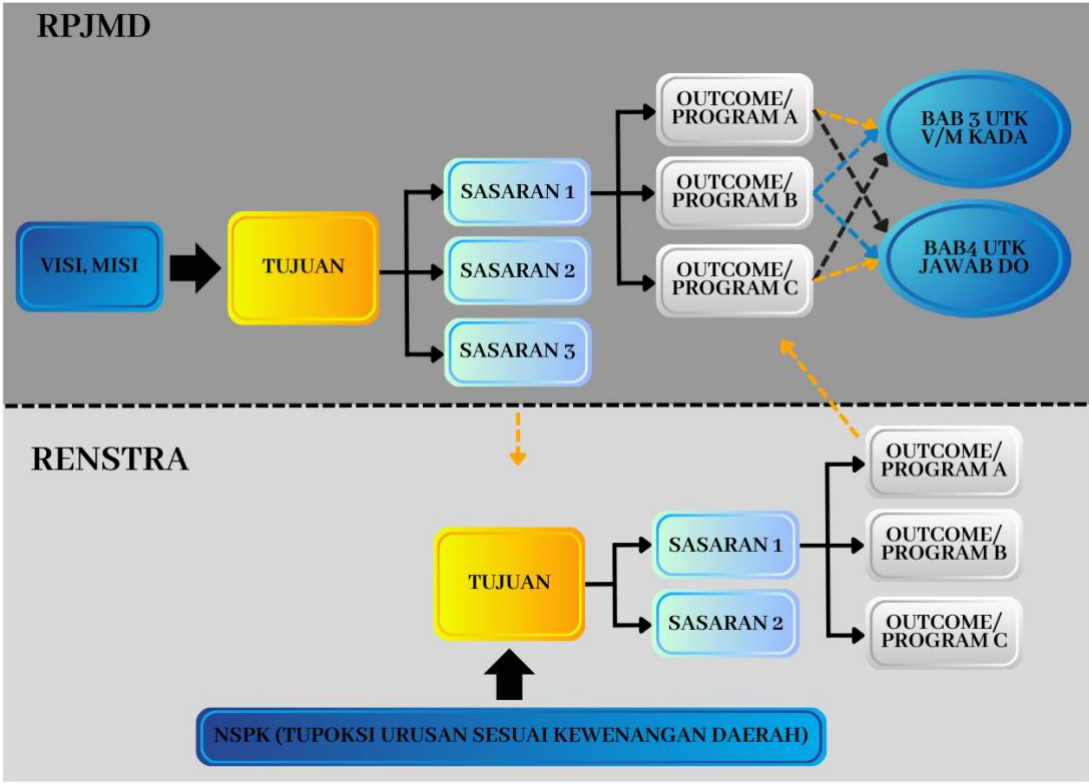
Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui:

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra PD yakni melakukan kegiatan-kegiatan antara lain: pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra PD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra PD

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Kepala DPPR Kota Balikpapan selaku Kepala Perangkat Daerah, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Renstra

disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program - program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka DPPR Kota Balikpapan perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) DPPR Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Balikpapan. Renstra DPPR Kota Balikpapan ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang dan dirumuskan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Renstra sebagai dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra DPPR Kota Balikpapan 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2025-2029 dan Renja PD, ilustrasi keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra PD dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.1**

**Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra PD**

## 1.2 **Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan Renstra DPPR Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan (lembar negara RI Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang – Undang (lembar negara RI nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang RTRW Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
23. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Audit Tata Ruang;
24. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik;
29. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang;
30. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
31. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pendoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025 - 2029 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan 2025 - 2029;
35. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara;
36. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

37. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah:
38. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043;
39. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor .... Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra DPPR Kota Balikpapan adalah melakukan penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja sasaran tahunan bagi DPPR Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada RPJMD tahun 2025-2029 dalam mewujudkan komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionisasikan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

Adapun tujuan penyusunan Renstra DPPR Kota Balikpapan adalah untuk dijadikan landasan dan/atau pedoman dalam memberikan arah bagi seluruh dimensi kegiatan dalam penyusunan Renja DPPR, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPPR Kota Balikpapan ini.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra DPPR Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
2.1.2	Sumber Daya Perangkat Daerah
2.1.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.4	Kelompok Sasaran Layanan
2.2	Permasalahan dan Isu strategis Perangkat Daerah
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
3.2	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V	PENUTUP



**GAMBARAN PELAYANAN,  
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH****BAB II****2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah****2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat membawahkan Kasubbag Umum dan Kasubbag Program dan Keuangan, Bidang Pertanahan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional, Bidang Penataan Ruang membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional, dan Bidang Pengawasan dan Pengendalian membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional. Susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) terdiri dari 1 sekretariat dan 3 bidang.

DPPR mempunyai tugas membantu Wali Kota Balikpapan melaksanakan urusan pemerintahan pertanahan dan urusan penataan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan, penataan ruang dan penataan bangunan dan lingkungannya;
2. Penyusunan dan penetapan tata ruang dan kawasan strategis daerah;
3. Penyusunan dan penetapan RTRW dan rencana detail tata ruang;
4. Pengembangan dan penyebaran sistem informasi dan komunikasi pertanahan, penataan ruang, penataan bangunan dan lingkungannya;
5. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan pertanahan, penataan ruang penataan bangunan dan lingkungannya;
6. Pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian teknis dan pembinaan serta pelaporan dibidang pertanahan, penataan ruang, penataan bangunan dan lingkungan;
7. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengendalian pemberian layanan perizinan bidang pertanahan dan penataan ruang;

8. Pelaksanaan pemberian rekomendasi di bidang pertanahan dan penataan ruang;
9. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi penyelenggaraan urusan pertanahan, penataan ruang, penataan bangunan dan lingkungannya;
10. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang;
11. Penyusunan RTRW, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis, RDTR Kota dan peraturan zonasi;
12. Pelaksanaan sinkronisasi program pembangunan dan penataan ruang Kota;
13. Penyusunan perangkat insentif dan disinsentif penataan ruang;
14. Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang tingkat kota;
15. Operasionalisasi PPNS bidang penataan ruang;
16. Pengevaluasian pemanfaatan ruang tingkat Kota;
17. Perumusan regulasi, dan tatalaksana penyelenggaraan urusan pertanahan dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
18. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, ganti kerugian dan santunan tanah yang menjadi kewenangan daerah;
19. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan sebagai berikut:



Gambar 2.1

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG**

Adapun tugas fungsi jabatan struktural dalam melaksanakan pekerjaan pada urusan bidang sebagai berikut:

**1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas seperti disebutkan diatas serta menjalankan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan, mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan

bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
2. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
3. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
4. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
5. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
6. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
7. Pengelolaan anggaran Dinas;
8. Pelaksanaan administrasi keuangan;
9. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
10. Pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
11. Pengoordinasian bidang dan UPT;
12. Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggungjawab langsung pada sekretaris terdiri dari:

## **2.1 Sub Bagian Umum**, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- g. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;



- i. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- k. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- n. Memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
- o. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksana;
- p. Menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- q. Memfasilitasi pembinaan tata kelola pelayanan publik;
- r. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.

## **2.2 Sub Bagian Program dan Keuangan**, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
  - 1. Rencana Strategis;
  - 2. Rencana Kerja;
  - 3. Rencana Kerja Tahunan;
  - 4. Penetapan Kinerja; dan
  - 5. Laporan Kinerja;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. Melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan pemeliharaan aplikasi dengan bidang;
- f. Melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas bidang;

- g. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- i. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- j. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- k. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- l. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
- m. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- n. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
- o. Menyusun laporan keuangan Dinas;
- p. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya

### **3. Bidang Pertanahan**

Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, perumusan, pengkajian dan pengaturan di bidang pertanahan. Bidang Pertanahan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- 1. Penyusunan kebijakan teknis dan program kerja bidang pertanahan;
- 2. Penyiapan bahan kebijakan/ regulasi tatalaksana administrasi pertanahan;
- 3. Pengelolaan data informasi dan pengevaluasian pelaksanaan administrasi pertanahan, analisa pertanahan dan pengawasan, pengaduan dan penanganan sengketa pertanahan;
- 4. Pelaksanaan evaluasi strategi perencanaan dan administrasi di bidang pertanahan;
- 5. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi di bidang pertanahan;
- 6. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pertanahan;

7. Pengelolaan informasi, penyuluhan dan penyebarluasan pemanfaatan tanah, dan administrasi di bidang pertanahan;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pertanahan; dan
9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bidang Pertanahan membawahkan substansi yang dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator dan bertanggung jawab langsung pada kepala bidang yang terdiri dari :

### **3.1 Sub Bagian Program dan Keuangan**, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Substansi administrasi pertanahan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan program dan kegiatan Substansi Administrasi Pertanahan;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
- d. Menyiapkan bahan penerbitan layanan administrasi pertanahan sesuai sistem dan prosedur yang berlaku;
- e. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelayanan administrasi pertanahan dengan kecamatan;
- f. Mengelola seluruh database administrasi pertanahan;
- g. Menyusun tatalaksana administrasi pertanahan;
- h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan peralihan dan perubahan penggunaan tanah serta pengumpulan data dalam rangka bimbingan pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah;
- i. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi dan penyelesaian permasalahan tanah kosong;
- j. Melaksanakan perencanaan pemanfaatan tanah kosong;
- k. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemetaan zona nilai tana
- l. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah;
- m. Mengoordinasikan dan menyediakan fasilitas pendukung dalam mensukseskan Catur Tertib Pertanahan;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Substansi Administrasi Pertanahan; dan

- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **3.2 Substansi Analisa Pertanahan,** mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan menyusun program dan kegiatan Substansi Analisa Pertanahan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan program dan kegiatan Substansi Analisa Pertanahan;
- c. Menganalisa kebijakan dan tatalaksana dalam bidang pertanahan;
- d. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan analisa bidang pertanahan.;
- e. Melaksanaa penyuuluhan dan bimbingan bidang pertanahan kepada masyarakat;
- f. Menyiapkan arahan rencana pemanfaatan tanah untuk kepentingan investasi dan masyarakat berdasarkan perencanaan pengadaan tanah;
- g. Melaksanakan arahan pemberian izin lokasi untuk pemanfaatan tanah;
- h. Menyelenggarakan pembinaan kepada para penerima hak atas tanah melalui redistribusi dan kosolidasi tanah;
- i. Mengkoordinasikan dan menyediakan fasilitas pendukung dalam mensukseskan Catur Tertib Pertanahan;
- j. Menganalisa, merumuskan kebijakan dan menetapkan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah;
- k. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi dan penyelesaian permasalahan tanah ulayat
- l. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Substansi Analisa Pertanahan; dan
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **3.3 Substansi Administrasi Pengadaan Tanah,** mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan Substansi Administrasi Pengadaan Tanah;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan program dan kegiatan di bidang Administrasi Pertanahan;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pertanahan;



- d. Menyiapkan bahan penerbitan layanan administrasi pertanahan sesuai sistem dan prosedur yang berlaku;
- e. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelayanan administrasi pertanahan dengan kecamatan;
- f. Mengelola seluruh database administrasi pertanahan;
- g. Menyusun tatalaksana administrasi pertanahan;
- h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan peralihan dan perubahan penggunaan tanah serta pengumpulan data dalam rangka bimbingan pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah;
- i. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan administrasi pertanahan; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **4. Bidang Penataan Ruang**

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas merencanakan, mengordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Penataan Ruang. Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- 1. Penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 2. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kota, RTR KSK dan RDTR Kota;
- 3. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang;
- 4. Pelaksanaan sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang;
- 5. Pengoordinasian dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kota, RTR KSK dan RDTR Kota serta Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah;
- 6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;
- 7. Pelaksanaan Sistem Informasi Penataan Ruang;
- 8. Pengoordinasian dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif serta Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang;
- 9. Pelaksanaan operasionalisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang;

10. Pengoordinasian Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan penataan ruang;
11. Pengkoordinasian pelaksanaan layanan administrasi penataan ruang; dan
12. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bidang Penataan Ruang membawahkan substansi yang dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang, terdiri dari:

#### **4.1 Substansi Perencanaan Tata Ruang**, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan substansi perencanaan tata ruang;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan program dan kegiatan Substansi Perencanaan Tata Ruang;
- c. Menyiapkan seluruh bahan dokumen untuk persetujuan substansi dokumen perencanaan seperti RTRW Kota, RTR KSK dan RDTR Kota;
- d. Membuat peta dasar dan peta tematik dengan tingkat ketelitian geomatis dan muatan ruang;
- e. Melakukan sosialisasi peraturan penataan ruang dengan menyediakan peta analog dan peta digital sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang penataan Ruang;
- f. Melakukan analisa dan koordinasi dalam penyusunan materi teknis, naskah akademis dan KLHS produk perencanaan;
- g. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi untuk pembahasan lintas sektor pada setiap dokumen perencanaan tata ruang;
- h. Melakukan evaluasi, pemantauan dan pelaporan kinerja perkembangan penyusunan produk perencanaan;
- i. Melakukan kegiatan peninjauan kembali, penyesuaian/revisi produk perencanaan dengan melihat perkembangan kota dan hasil evaluasi;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Substansi Perencanaan Tata Ruang; dan
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **4.2 Subtansi Tata Bangunan dan Bangunan Gedung,** mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan substansi Tata Bangunan dan Bangunan Gedung;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan program dan kegiatan substansi Tata Bangunan dan Bangunan Gedung;
- c. Melaksanakan fasilitasi kesekretariatan kegiatan pembahasan sinkronisasi pemanfaatan ruang dengan Forum Penataan Ruang;
- d. Menyiapkan bahan, melakukan dokumentasi dan pelaporan kegiatan konsultasi publik yang melibatkan masyarakat;
- e. Melaksanakan kegiatan pemberian informasi peruntukan lahan sesuai RTRW Kota, RTR KSK dan RDTR Kota yang termuat dalam KRK dan ITR;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR);
- g. Menyiapkan bahan rekomendasi/persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR);
- h. Melaksanakan pemutakhiran data dalam Sistem Informasi Penataan Ruang;
- i. Membuat arahan rancana pemanfaatan ruang/rekomendasi informasi tata ruang dan site plan untuk kepentingan investasi dan pembangunan daerah;
- j. Menyiapkan dan mengolah data dan informasi pemanfaatan tata ruang;
- k. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan dinas teknis lainnya terkait kebijakan pemanfaatan ruang;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Substansi Tata Bangunan dan Bangunan Gedung; dan
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **4.3 Substansi Arsitektur Kota,** mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan substansi Arsitektur Kota;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan program dan kegiatan urusan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

- c. Melaksanakan survei lapangan dalam rangka kesesuaian pemanfaatan ruang;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan unit pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang;
- e. Melaksanakan fasilitasi kesekretariatan operasional PPNS Penataan Ruang;
- f. Menyusun standar operasional dan prosedut pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tata ruang;
- g. Menyiapkan data dan informasi pengawasan dan penertiban tata ruang;
- h. Membuat dokumentasi dan pelaporan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang penataan ruang;
- i. Melakukan analisa, koordinasi dan sinkronisasi dengan dinas teknis lainnya terkait pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang;
- j. Memberikan rekomendasi pengendalian, penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran substansi Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **5 Bidang Pengawasan dan Pengendalian**

Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidang Pengawasan dan Pengendalian. Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Bidang Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan perencanaan kebijakan strategis dan teknik sistem penataan bangunan dan lingkungannya;



2. Pelaksanaan supervisi penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan;
3. Pengkoordinasian penataan bangunan dan lingkungan;
4. Pengkoordinasian pemeliharaan bangunan dan lingkungan;
5. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan;
6. Pelaksanaan monitoring, penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan;
7. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan membawahkan substansi yang dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang, terdiri dari:

## **5.1 Substansi Pengawasan, Pengaduan dan Penanganan Sengketa Tanah** mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Substansi Pengawasan, Pengaduan dan Penanganan Sengketa Tanah;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan program dan kegiatan Substansi Pengawasan, Pengaduan dan Penanganan Sengketa Tanah;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis dalam perencanaan penataan bangunan dan lingkungan dalam bentuk Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
- d. Menyusun perencanaan teknis kegiatan pembangunan dan penataan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya;
- e. Menyiapkan rumusan kebijakan perencanaan muatan lokal arsitektur kota;
- f. Melaksanakan layanan *advice*/informasi perencanaan dan penataan arsitektur kota (ornament kota, tipologi bangunan dan kontekstual bangunan terhadap lingkungannya);
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Instansi terkait dalam perencanaan penataan bangunan dan lingkungan yang menjadi aset Pemerintah Daerah;
- h. Menyiapkan bahan konsultasi publik terkait penyusunan perencanaan penataan dan pemeliharaan di kawasan cagar

budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya;

- i. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Substansi Perencanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- j. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5.2 Substansi Pengawasan Tata Ruang dan Tata Bangunan,** mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Substansi Pengawasan Tata Ruang dan Tata Bangunan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan program dan kegiatan Substansi Pengawasan Tata Ruang dan Tata Bangunan;
- c. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran urusan Perencanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5.3 Substansi Pengaduan dan Penertiban Tata Ruang dan Bangunan,** mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Substansi Pengaduan dan Penertiban Tata Ruang dan Bangunan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan program dan kegiatan Substansi Pengaduan dan Penertiban Tata Ruang dan Bangunan;
- c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data pengendalian tata bangunan dan lingkungannya di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya;
- d. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan, penataan dan pemeliharaan fisik di kawasan

cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya;

- e. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembangunan, penataan dan pemeliharaan fisik di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya;
- f. Menyusun bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait tata bangunan dan lingkungan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya;
- g. Melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Substansi Perencanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
- i. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **6 Unit Pelaksana Teknis Dinas.**

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota.

### **2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi



strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, kondisi Pegawai yang dibutuhkan berdasarkan golongan dan pendidikan pada per tanggal 13 Agustus 2025 disajikan pada tabel 2.1 sampai dengan tabel 2.4:

**Tabel 2.1**  
**Data Pegawai ASN dan Non ASN**  
**Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025**

Sumber :  
Sub.  
Bagian  
Umum  
DPPR Per  
13 Agustus  
2025

**Tabel**  
**2.2**  
**Data**

No	Unit	PNS Per Golongan				PPPK	Non PNS	Pegawai Menurut Jenis Kelamin				
								PNS		PPPK		Non PNS
		I	II	III	IV			L	P	L	P	
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
2	Sekretariat	-	4	5	1	1	1	5	4	-	1	-
3	Bidang Pertanahan	-	3	6	2	2	-	10	1	1	1	-
4	Bidang Penataan Ruang		1	7	1	5	-	6	3	5	-	-
5	Bidang Pengawasan dan Pengendalian	-	1	3	2	5	-	5	1	4	1	-
TOTAL		0	9	21	7	13	1	26	10	10	3	0

**Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

**Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025**

Unit	PNS dan PPPK					NON PNS				Total
	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	SLTA	D-3	S-1	S-2	
Kepala	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Sekretariat	1	2	-	7	-	-	1	1	-	12
Bidang Pertanahan	1	3	-	8	1	-	-	-	-	13
Bidang Penataan Ruang	-	6	1	4	3	-	-	-	-	14
Bidang Pengawasan dan Pengendalian	-	3	-	4	1	-	-	1	-	9
Jumlah	2	12	1	23	6		1	2		49

Sumber : Sub. Bagian Umum DPPR Per 13 Agustus 2025

**Tabel 2.3**  
**Data Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang**  
**Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025**





No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Tk. I (IV/b)	1
2	Pembina (IV/a)	6
3	Penata Tk. I (III/d)	7
4	Penata (III/c)	1
5	Penata Muda Tk. I (III/b)	4
6	Penata Muda (III/a)	9
7	Pengatur Tk. I (II/d)	6
8	Pengatur (II/c)	2
9	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1
10	PPPK	12
	JUMLAH	49

Sumber :  
Sub. Bagian Umum DPPR Per 13 Agustus 2025



Tabel 2.4

Data Pegawai Sesuai Urutan Jabatan  
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
PNS Struktural		
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang Pertanahan	1
4	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian	1
5	Kepala Bidang Penataan Ruang	1
6	Kepala Sub Bagian Umum	1
7	Kepala Sub Bagian Program dan Penataan Ruang	1
PNS Fungsional		
1	Analisis Kebijakan Ahli Muda	2
2	Penata Ruang Muda	5
3	Penata Ruang Pertama	1
4	Surveyor Pemetaan Pertama	1
5	Penelaah Teknis Kebijakan	6
6	Pranata Kewilayahan	1
7	Pengadministrasi Perkantoran	13
8	Operator Layanan Operasional	1
PPPK		
1	Surveyor Pemetaan	2
2	Penata Layanan Operasional	4
3	Pengelola Layanan Operasional	2
4	Operator Layanan Operasional	3
5	Pengadministrasi Perkantoran	2
1	Tenaga Bantu Teknis II	1
Total		51

Sumber : Sub. Bagian Umum DPPR Per 13 Agustus 2025

Selain di dukung dengan Sumber Daya Aparatur, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang juga memiliki sarana dan prasarana pendukung, yang data disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.5**  
**Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025**

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			B	RR	RB	
1	P.C Unit	20	12	3	5	
2	Lap Top	18	13		5	
3	Note Book	14	10	4		
4	Tablet PC	2	2			
5	Personal Komputer lainnya	6	6			
6	CPU (Peralatan Mainframe)	3	3			
7	Hard Disk	6	6			
8	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	1			
9	Printer (Peralatan Personal Komputer)	43	34	4	5	
10	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	2			
11	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	1	1			
12	External/ Portable Hardisk	2	2			
13	Peralatan Personal Komputer lainnya	3	3			
14	Station Wagon	5	4	1		
15	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	3			3	
16	Pick Up	5	5			
17	Sepeda Motor	20	16	2	2	
18	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1			1	
19	kapal terbang lainnya (dst)	2	2			
20	Global Positioning System	5	2		3	
21	Scanner (Universal Tester)	2	2			
22	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	6	5		1	
23	Lemari Penyimpan	2	2			
24	Mesin Ketik Listrik	1		1		
25	Mesin Fotocopy Folio	1	1			
26	Lemari Besi/Metal	1	1			
27	Filing Cabinet Besi	7	7			
27	Lemari Kaca	4	4			
28	CCTV - Camera Control Television System	2	2			

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			B	RR	RB	
29	Alat Penghancur Kertas	4	2		2	
29	Mesin Absensi	2	1		1	
30	Papan Pengumuman	18	1		17	
31	Alat Kantor Lainnya	14	4		10	
32	Meja Tambahan	1	1			
33	Meja 1/2 Biro	6	1		5	
34	Kursi Rapat	2	2			
36	Sofa	1	1			
37	Meubeleur lainnya	1	1			
38	Televisi	5	5			
39	Sound System	1		1		
40	Unit Power Supply	2	2			
41	Camera Video	1	1			
42	Coffee Maker	1	1			
43	Alat Rumah Tangga Lain-lain	5	3		2	
44	Meja Kerja Pejabat Eselon III	8	8			
45	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	19	19			
46	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	11	5		6	
47	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	2			
48	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	12	8	2	2	
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	11			
50	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	48	33	5	10	
51	Uninterruptible Power Supply (UPS)	6	4		2	
52	peralatan studio audio lainnya (dst)	5	5			
53	Camera Electronic	2	2			
54	Layar Film/Projector	1	1			
55	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	1	1			
56	Alat Studio Pemetaan lainnya	2	2			
57	Telephone Mobile	4	4			
58	Web Cam	1	1			
59	Lemari Es	1	1			

Sumber data : Kartu Inventaris Barang (KIB) B DPPR, 2025

Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur serta kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan, sangat diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Sarana dan prasarana yang memadai merupakan bagian integral dalam menciptakan sistem kerja yang efektif dan efisien serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara optimal.

Namun demikian, hingga saat ini Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan belum memiliki gedung kantor yang representatif dan sesuai dengan standar pelayanan minimal penyelenggaraan urusan pertanahan dan penataan ruang. Saat ini, DPPR menempati bangunan eksisting yang tidak mampu mengakomodasi seluruh kegiatan operasional dan pelayanan, mengingat jumlah pegawai yang ada sebanyak 52 orang. Kondisi tersebut menyebabkan keterbatasan ruang kerja, ruang pelayanan, serta fasilitas pendukung lainnya, yang pada akhirnya berdampak pada kurang optimalnya proses pelayanan kepada masyarakat.

Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan telah mengajukan surat kepada Wali Kota Balikpapan melalui surat nomor: 596/440/DPPR tanggal 25 Juni 2021 perihal Permohonan Penunjukan Tanah, guna mendukung percepatan pembangunan gedung kantor yang layak dan representatif. Harapannya, dengan adanya penunjukan lahan tersebut, DPPR dapat segera memiliki gedung kantor baru yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan mampu menunjang kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Selain kebutuhan terhadap gedung kantor yang memadai, penyediaan prasarana tersebut juga harus dibarengi dengan ketersediaan sarana yang baik, seperti peralatan kerja dan perlengkapan kantor lainnya. Berdasarkan inventarisasi aset yang dimiliki saat ini, sebagian besar barang dalam kondisi kurang layak digunakan, dengan banyak di antaranya mengalami kerusakan ringan hingga kerusakan berat. Hal ini disebabkan oleh usia barang yang sudah lebih dari lima tahun, di mana sebagian besar berasal dari hibah atau peralihan dari perangkat daerah lain.

Kondisi keterbatasan sarana ini tentu menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, sehingga sangat diperlukan peremajaan dan pengadaan sarana yang sesuai standar dan kebutuhan kerja. Data rinci terkait jumlah dan kondisi aset yang dimiliki

oleh DPPR Kota Balikpapan dapat dilihat dalam rekapitulasi data aset yang telah disusun sebagai bagian dari laporan ini.

Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, diharapkan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan mampu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat pelayanan publik, serta memberikan kenyamanan bagi pegawai maupun masyarakat pengguna layanan.

**2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang selama 5 tahun terakhir (2021 – 2026) dapat dijelaskan secara umum pada indikator kinerja utama Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang digunakan secara terus menerus menunjukkan trend positif, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adapun matrikulasi realisasi dan capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026 sebagaimana tabel di bawah ini:



**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan**

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun Ke-				Realisasi Kinerja Tahun Ke-				Rasio Kinerja Tahun		
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
1	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	%	89,2	89,4	89,74	89,8	89,74	89,74	96,49	-	100,61%	100,38%	107,...
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Nilai	0,14	0,15	0,21	0,22	0,14	0,195	0,25	-	100,00%	130,00%	119,...
1.1.1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen tentang peraturan penyelenggaraan penataan ruang yang ditetapkan	%	50	75	75	-	33,33	50	80	-	2,80%	66,67%	106,...
1.1.1.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	orang	-	-	360	-	-	-	342	-	-	-	95,0...
1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah	%	20	40	60	80	22	55,44	82,56	-	110,00%	138,60%	137,...
1.1.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	dokumen	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100,...
1.1.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	dokumen	-	-	6	-	-	-	7	-	-	-	116,...
1.1.2.3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Kegiatan	-	-	7	6	-	-	22	-	-	-	314,...
1.1.2.4	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang	%	90	91	92	93	87,2	89,4	76,38	-	96,89%	98,24%	83,0...

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun Ke-				Realisasi Kinerja Tahun Ke-				Rasio Kinerja Tahun		
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
1.1.3.1	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	sistem informasi	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	100,00%
1.1.3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	dokumen	-	900	900	-	-	1226	908	-	-	136,22%	100,00%
1.1.3.3	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.4	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	dokumen	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	persentase koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah	%	91	92	93	94	20	100	100	-	21,98%	108,70%	107,69%
1.1.4.1	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	dokumen	-	-	330	365	-	-	468	-	-	-	141,65%
1.1.4.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	dokumen	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100,00%	-
2	Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	%	14	22	31	31	20	25	42	-	142,86%	113,64%	135,29%
2.1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	14	22	27	31	20	25	42	-	142,86%	113,64%	155,24%
2.1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase RTBL yang ditetapkan	%	25	33	38	40	28.57	54.55	53	-	4,83%	6,93%	139,58%
2.1.1.1	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	-	-	5	4	-	-	5	-	-	-	100,00%
2.1.1.2	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kawasan	-	-	5	6	-	-	5	-	-	-	100,00%



No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun Ke-				Realisasi Kinerja Tahun Ke-				Rasio Kinerja Tahun		
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
2.1.1.3	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	dokumen	-	-	1	1	-	-	0	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	dokumen	-	-	4	4	-	-	5	-	-	-	125,00%
2.1.1.5	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	-	2	-	-	-	2	-	-	-	100,00%	-
2.1.1.6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	-	300	-	-	-	204	-	-	-	68,00%	-
3	Meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan	Prosentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan (IMTN dan Fasilitasi Sengketa Tanah)	%	80	81	80	82	88,86	75	85	-	111,08%	92,59%	106,11%
3.1	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase luas pemanfaatan ijin lokasi yang diterbitkan	%	70	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saran teknis yang diberikan pada permohonan ijin lokasi	%	80	41,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi	%	41,7	-	39	38	56	44	40	-	134,29%	-	102,56%
3.2.1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase dokumen pengaduan sengketa tanah garapan yang terverifikasi	%	41,7	-	50	62,5	100	36	50	-	239,81%	-	100,00%
3.2.1.1	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	berita acara	-	89	10	-	-	80	4	-	-	89,89%	40,00%
3.2.1.2	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	-	89	12	-	-	31	0	-	-	34,83%	0,00%
3.3	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan	%	88	-	90	91	63,12	80	88	-	-	-	97,78%
3.3.1	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase rekomendasi IMTN yang diterbitkan	%	88	-	90	91	63	31	84	-	71,59%	-	93,33%

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun Ke-				Realisasi Kinerja Tahun Ke-				Rasio Kinerja Tahun		
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
3.3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	dokumen	-	89	230	220	-	-	252	-	-	-	109,7
3.3.1.2	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara			-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah	Persentase luas tanah yang telah dibebaskan	%	-	69,4	80,24	76,44	62,96	0	80	-	-	-	99,7
4.1	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Luas Tanah yang diberikan Ganti Rugi yang dilaksanakan oleh DPPR	%	66,33	69,49	72,65	76,44	62,96	67	80	-	-	96,42%	110,7
4.1.1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rata-Rata Persentase tahapan pengadaan tanah yang sudah dilaksanakan oleh DPPR	%	25,85	41,67	60,26	79,86	62	17	66	-	239,85%	40,80%	109,7
4.1.1.1	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	dokumen	-	3	2	2	-	3	1	-	-	100,00%	50,0
4.1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	100,0
5	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPPR	Nilai Reformasi Birokrasi DPPR	Nilai	-	27,5	0	28,5	29,38	0	0	-	-	-	-
5.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	80	81	82	83	-	81	84,32	-	-	100,00%	102,8
5.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DPPR	Nilai	65,9	65,95	70	28,5	67,79	-	-	-	102,87%	-	-
5.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	80	81	82	83	-	83,33	85,23	-	-	102,88%	103,8

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun Ke-				Realisasi Kinerja Tahun Ke-				Rasio Kinerja Tahun		
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
5.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	-	-	38	39	-	-	38	-	-	-	100,00%
5.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai	80	81	82	83	-	81	83,27	-	-	100,00%	101,00%
5.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	80	81	82	83	78	82,12	85,08	-	97,50%	101,38%	103,00%
5.1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	80	-	2	2	-	-	2	-	-	-	100,00%
5.1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	80	-	50	46	-	-	50	-	-	-	100,00%
5.1.4.3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	-	2	-	0	-	2	-	-	-	100,00%	-
5.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	80	81	82	83	76	81	83,04	-	95,00%	100,00%	101,00%
5.1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	100,00%
5.1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	7	7	-	-	7	-	-	-	100,00%
5.1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	-	-	3	1	-	-	2	-	-	-	66,67%
5.1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-	-
5.1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	-	-	200	150	-	-	122	-	-	-	61,00%
5.1.5.6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	8	3	-	-	1	-	-	-	12,50%
5.1.5.7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100,00%

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun Ke-				Realisasi Kinerja Tahun Ke-				Rasio Kinerja Tahun		
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
5.1.5.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	-	-	2	12	-	-	2	-	-	-	100,00%
5.1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	80	81	82	83	-	80	84,15	-	-	98,77%	102,00%
5.1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	-	4	1	-	-	4	-	-	-	100,00%
5.1.6.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	80	-	13	0	68	-	13	-	85,00%	-	100,00%
5.1.6.3	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	-	1	-	0	-	1	-	-	-	100,00%	-
5.1.6.4	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	0	3	-	-	0	-	-	-	-
5.1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	80	81	82	83	-	81	84	-	-	100,00%	102,00%
5.1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat	Jenis	1	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-
5.1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	-	-	1	2	80	-	1	-	-	-	100,00%
5.1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	-	-	36	36	1	-	36	-	-	-	100,00%
5.1.7.4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	100,00%
5.1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	80	81	82	83	69	79	84,66	-	86,25%	97,53%	103,00%
5.1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	-	-	8	1	-	-	8	-	-	-	100,00%



No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun Ke-				Realisasi Kinerja Tahun Ke-				Rasio Kinerja Tahun		
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
5.1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	-	-	21	34	-	-	11	-	-	-	52,3
5.1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	30	50	-	-	32	-	-	-	106,7
6	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada DPPR	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	-	-	70	-	-	67,88	72,07	-	-	-	102,3



Sedangkan realisasi pelaksanaan anggaran selama tahun 2021-2026 sebagaimana tabel di bawah dimana diketahui bahwa terdapat perubahan nomenklatur Program, Kegiatan dan Subkegiatan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Perbandingan (rasio) antara realisasi dan anggaran yang direncanakan tercapai dengan baik pada program urusan pertanahan dan urusan penyelenggaraan penataan ruang dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 2.7

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan

Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan	Target Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata P
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Anggaran
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan	310.000.000	170.388.000	385.825.000	234.231.300	250.000.000	189.362.900	69.881.300	303.076.413	11.783.000	-	61,08	42,57	78,55	5,03		270.088.860
Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase rekomendasi IMTN yang diterbitkan	310.000.000	170.388.000	385.825.000	234.231.300	250.000.000	189.362.900	69.881.300	303.076.413	11.783.000	-	61,08	42,57	78,55	5,03		270.088.860
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	310.000.000	164.138.000	385.825.000	234.231.300	250.000.000	189.362.900	69.881.300	303.076.413	11.783.000	-	61,08	42,57	78,55	5,03		268.838.860
Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	0	6.250.000	-	-	-	0	0	-	-	-	0	0				1.250.000
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi	30.000.000	541.573.500	176.500.000	0	30.000.000	9.924.500	156.817.770		0		33,08	28,96				155.614.700
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase dokumen pengaduan sengketa tanah garapan yang terverifikasi	30.000.000	541.573.500	176.500.000	0	30.000.000	9.924.500	156.817.770		0		33,08	28,96				155.614.700
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	541.573.500	20.000.000	0	20.000.000	9.924.500	156.817.770	7.069.000	0		33,08	28,96	35,35	0		122.314.700
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	156.500.000	0	10.000.000	0	0	40.089.011	0		0	0	25,62			33.300.000
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Luas Tanah yang diberikan Ganti Rugi yang dilaksanakan oleh DPPR	64.700.692.290	50.864.577.634	5.541.143.600	37.309.432.090	52.004.000.000	12.659.862.358	38.870.329.847	2.811.152.740	128.106.415		19,57			0,34		42.083.969.122

Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan	Target Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata R
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Anggaran
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rata-Rata Persentase tahapan pengadaan tanah yang sudah dilaksanakan oleh DPPR	64.700.692.290	50.864.577.634	5.541.143.600	37.309.432.090	52.004.000.000	12.659.862.358	38.870.329.847	2.811.152.740	128.106.415		19,57					42.083.969.122
Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	64.700.692.290	382.900.000	319.200.000	400.000.000	300.000.000	12.659.862.358	52.010.834	64.457.126	0		19,57	13,58	20,19	0		13.220.558.458
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	50.781.677.634	5.221.943.600	36.909.432.090	51.704.000.000	0	38.818.278.909	2.746.695.614	128.106.415			76,44	52,60	0,35		28.923.410.664
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>	<b>1.164.562.800</b>	<b>2.508.814.400</b>	<b>2.999.362.000</b>	<b>4.000.473.125</b>	<b>7.135.000.000</b>	<b>847.561.250</b>	<b>1.917.311.156</b>	<b>2.342.884.555</b>	<b>154.841.810</b>		<b>84,76%</b>			<b>3,87</b>		<b>3.561.642.465</b>
<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	Persentase dokumen tentang peraturan penyelenggaraan penataan ruang yang ditetapkan	315.844.500	300.000.000	450.000.000		725.000.000	183.554.143	220.000.000	340.135.300			58,12		75,59			358.168.900
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen persetujuan substansi penetapan RTRW yang sudah melalui proses konsultasi dan evaluasi	315.844.500	300.000.000				183.554.143	220.000.000				58,12					123.168.900
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	-	-	-	-	200.000.000											40.000.000
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	-	-	-	-	300.000.000											60.000.000
Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	-	-	-	-	25.000.000											5.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	-	-	450.000.000		200.000.000		0	340.135.300			0	0	75,59			130.000.000



Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan	Target Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata R
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Anggaran
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah	574.673.300	956.875.400	1.600.000.000	1.425.388.400	2.260.000.000	477.528.913	638.839.927	1.314.782.214	5.662.500					0,40		1.363.387.420
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	-	157.930.000	550.000.000	-	-		47.251.084	535.111.332	-	-		29,92	97,29			141.586.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	550.923.300	500.000.000	750.000.000	-	-	458.473.913	365.932.343	726.840.882	-	-	83,22	73,19	96,91		0,00%	360.184.660
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	123.750.000	298.945.400	300.000.000	231.000.000	400.000.000	19.055.000	225.656.500	52.830.000	5.662.500		15,40	75,48	17,61	2,45		270.739.080
Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan					360.000.000											72.000.000
Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	-	-	-	1.194.388.400	1.500.000.000				0	-				0		538.877.680
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang	0	931.448.000	563.352.000	2.394.774.725	1.450.000.000		785.416.350	426.459.395	127.494.879		0	84,32	75,70	5,32		1.067.914.945
Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	0	931.448.000	563.352.000	573.000.000	700.000.000		785.416.350	426.459.395	111.238.769		0	84,32	75,70	19,41		439.074.600
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	0	0		891.467.000	500.000.000		0	0	7.382.860		0	0		0,83		278.293.400
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	0	0		930.307.725	250.000.000		0	0	8.873.250		0	0		0,95		236.061.545
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	persentase koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah	274.045.000	320.491.000	386.010.000	180.310.000	2.700.000.000	229.850.406	273.054.879	261.507.646	21.684.431		83,87	74,28	67,75	12,03		736.109.200
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan	-	-	-	-	350.000.000											70.000.000

Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan	Target Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata R
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Anggaran
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																
Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	274.045.000	155.000.000	386.010.000	180.310.000	2.000.000.000	229.850.406	115.140.174	261.507.646	21.684.431		83,87	74,28	67,75	12,03		599.073.000
Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	-	-	-	-	100.000.000											20.000.000
Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	-	-	-	-	250.000.000											50.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	0	165.491.000	-	-	-	0	157.914.705				0	95,42				33.098.200
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	4.121.312.700	18.217.572.900	22.789.237.000	11.604.198.045	66.650.000.000	7.657.391.236		17.946.199.389	1.360.964.280					11,73		23.852.201.589
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase RTBL yang ditetapkan	4.121.312.700	18.217.572.900	22.789.237.000	11.604.198.045	66.650.000.000	7.657.391.236		17.946.199.389	1.360.964.280					11,73		23.852.201.589
Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.071.509.900	2.700.000.000	1.305.315.000	987.466.215	1.350.142.000	1.977.573.161	2.286.482.537	1.174.258.105	134.840.921		95,47	84,68	89,96	13,66		1.682.866.623
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	2.000.000.000	12.883.409.400	19.900.472.000	9.822.200.000	30.915.116.000	1.643.634.042	4.289.941.303	15.674.107.423	1.162.023.359		78,27	33,30	78,76	11,83		15.104.239.480
Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	49.802.800	49.802.800	50.000.000	50.000.000	20.000.000	15.315.300	9.007.500	0	0		30,75	96,08	0	0		43.921.120
Pemberdayaan Masyarakat dalam	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan	0	145.600.000				0	122.197.000	0			0	83,93	0			29.120.000



# DOKUMEN RANCANA STRATEGIS 2025-2029

Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan	Target Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Rasio
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Anggaran
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan																
Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	0	330.625.000	1.533.450.000	744.531.830	3.163.000.000	-	232.502.270	1.097.833.861	64.100.000			70,32	71,59	8,61		1.154.321.366
Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	0	2.148.563.500	0	0	0		1.699.764.215	0				79,11	0	0		429.712.700
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	10.076.300.200	13.621.627.700	11.291.542.200	12.530.121.055	3.432.962.500	7.697.172.953	7.697.172.953	7.697.172.953	6.099.354.582					48,68		10.190.510.731
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DPPR	0	0	45.000.000	36.400.000	0	0	0	0	15.950.000		0	0	0	43,82		16.280.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	45.000.000	36.400.000	0	0	0	0	15.950.000		0	0	0	43,82		16.280.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.520.409.000	7.802.298.600	7.456.461.400	8.852.430.480	9.400.000.000	5.673.846.250	6.176.713.669	6.669.449.405	4.795.769.308		87,02	79,17	89,45	54,17		8.006.319.896
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.520.409.000	7.802.298.600	7.456.461.400	8.852.430.480	9.400.000.000	5.673.846.250	6.176.713.669	6.669.449.405	4.795.769.308		87,02	79,17	89,45	54,17		8.006.319.896
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	400.000.000	211.000.000	586.523.000	603.267.300	436.000.000	243.662.772	188.916.379	526.887.100	501.214.972		97,47			83,08		447.358.060
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	150.000.000	0	56.523.000	78.267.300	0	0	0	51.450.000	0		0	0	91,02			56.958.060
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	250.000.000	186.000.000	530.000.000	525.000.000	436.000.000	243.662.772	164.810.509	475.437.100	501.214.972		97,47	88,61	89,71	95,47		385.400.000



# DOKUMEN RANCANA STRATEGIS 2025-2029

Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan	Target Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Rasio
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Anggaran
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Peraturan Perundang-Undangan																
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	25.000.000	0		0	0	24.105.870	0			0	96,42	0			5.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.408.498.400	2.625.286.300	1.210.650.800	1.220.147.500	1.226.089.300	661.239.109	2.148.375.571	1.040.136.454	263.405.549					21,59		1.538.134.460
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10.000.000	13.998.000	10.000.000	15.000.000	14.968.800	9.520.000	13.760.000	8.605.500			95,20	98,30	86,06			12.793.360
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	208.523.400	783.079.800	346.591.000	428.518.000	394.600.000	181.449.900	446.559.344	259.510.500	87.502.000		87,02	57,03	74,88	20,42		432.262.440
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	64.975.000	71.911.000	70.000.000	73.500.000	73.500.000	69.485.500	50.070.370	39.183.500	30.556.500		86,88	69,63	55,98	41,57		70.777.200
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	25.000.000	6.000.000	0			10.845.000	4.700.850	0			43,38	94,02	0			6.200.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.00	800.000.000	580.000.000	385.000.000	500.000.000	389.938.709	748.396.357	533.048.860	143.609.549		97,48	93,55	91,90	37,30		523.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	750.000.000	937.300.000	173.088.900	293.661.500	250.000.000	706.431.000	873.718.650	172.178.094			94,19	93,22	99,47			480.810.080
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	5.000.000	6.502.900			0	5.585.000	5.000.000			0	93,08	76,89			2.300.580
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	7.997.500	24.468.000	24.468.000	7.989.300	0	7.317.500	22.610.000	1.737.500		0	91,50	92,41	7,10		12.984.560
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	600.000.000	1.477.029.300	485.535.000	252.237.225	400.000.000	98.346.000	1.266.100.094	408.000.000	92.450.000		98,35				36,65	642.960.305
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	500.000.000	0	436.686.000	156.000.000	400.000.000	0	0	364.400.000	92.450.000		0	0	83,45	59,26		298.537.200



# DOKUMEN RANCANA STRATEGIS 2025-2029

Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan	Target Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Rasio
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Anggaran
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100.000.000	28.809.300	48.849.000		0	98.346.000	22.600.000	43.600.000			98,35	78,45	89,25			35.531.660
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0	3.000.000	0		0	0	1.887.000	0			0	62,90	0			600.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1.445.220.000	0	96.237.225	0	0	1.241.613.094	0			0	85,91	0			308.291.445
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	709.671.300	767.493.500	832.372.000	853.582.000	635.137.100	671.445.365	694.573.956	737.525.686	285.422.044					33,44		759.651.180
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	600.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	39.054.000	14.661.000	24.908.000	44.999.000	43.621.500	8.855.220	10.729.260	16.025.130	7.269.000		22,67	73,18	64,34	16,15		33.448.700
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	667.617.300	722.832.500	777.464.000	778.583.000	561.788.800	659.590.145	683.844.696	693.720.556	272.063.044		98,80	94,61	89,23	34,94		701.657.120
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	29.726.800	0	26.640.000	27.780.000	6.090.000		0	88,80	88,80	20,30		23.945.360
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	437.721.500	683.520.000	655.000.000	712.056.550	735.736.100	348.633.457	270.118.414	319.702.280	145.142.709					20,38		644.806.830
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	168.745.500	410.200.000	420.000.000	72.598.650	72.550.400	102.705.676	134.006.845	239.676.002	15.721.399		60,86	32,67	57,07	21,66		228.818.910
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	214.000.000	217.390.000	175.000.000	579.775.400	603.503.200	82.692.756	119.966.619	61.729.039	129.421.310		38,64	55,18	35,27	22,32		357.933.720





# DOKUMEN RANCANA STRATEGIS 2025-2029

Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan	Target Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Rasio
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Anggaran
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54.976.000	56.130.000	60.000.000	59.682.500	59.682.500	11.338.650	16.144.950	18.492.600			20,62	28,76	30,82			58.094.200



**2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok sasaran utama layanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan adalah 42 perangkat daerah dan 1 Badan Usaha Milik Daerah (Perumda Tirta Manuntung) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, dikarenakan sesuai tugas dan fungsinya yang telah diatur bahwa Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pertanahan dan penyelenggaraan penataan ruang.

Namun demikian, terdapat pula kelompok sasaran atas layanan yang diselenggarakan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan sesuai tugas dan fungsinya meliputi Otorita Ibu Kota Nusantara, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV, Balai Besar Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan.

**2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

**2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang secara optimal sebagaimana dapat dipetakan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.8**

**Pemetaan Permasalahan Layanan**

**Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih belum selesainya penyusunan 2 perda pemanfaatan ruang	Data pendukung untuk mendapat persetujuan substansi belum lengkap seperti citra satelit, penyusunan KLHS	Masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang
2	Masih adanya pelaksanaan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan	Masih lemahnya pengendalian dan penegakan hukum dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang	
3	Masih adanya alih fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat	Kurang kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan fungsi lahan	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) turut mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan	Penyesuaian fungsi kawasan untuk meningkatkan fungsi kawasan dalam rangka menunjang proyek Ibu Kota Negara	
5	Belum adanya pembaruan data peta sesuai dengan perubahan terbaru	Belum memadainya perangkat pendukung untuk pemutakhiran data peta	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam hal penyediaan basis data
6	Belum adanya sistem informasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Kurangnya ketersediaan SDM, data pendukung dan infrastruktur terkait pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	
7	Masih banyaknya IMTN yang bermasalah dan persyaratan yang belum lengkap	Kurang pemahaman masyarakat terhadap dokumen kelengkapan persyaratan IMTN dan tumpang tindih lahan masyarakat	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi dokumen pertanahan yang dimiliki
8	Masih belum rampungnya pengadaan lahan untuk pembangunan Bendungan Teritip	Terdapat tumpang tindih penguasaan lahan masyarakat dalam lokasi penetapan bendungan teritip	Belum tercapainya kesepakatan antara pihak yang bersengketa
9	Masih terhambatnya pengadaan tanah untuk pembangunan Institut Teknologi Kalimantan (ITK)	Pembaharuan penetapan lokasi sehingga dilakukan penyusunan ulang dokumen perencanaan	Perubahan desain jalan masuk ITK
10	Belum optimalnya pengerjaan proyek pelebaran jalan Letjend Suprpto	Masih kurang lengkap dokumen persyaratan pembayaran ganti rugi tanah (sertifikat tanah menjadi agunan)	Belum tercapainya kesepakatan antara pihak / instansi terkait untuk memfasilitasi percepatan kelengkapan dokumen persyaratan pembayaran ganti rugi
11	Belum Berlanjutnya pengadaan tanah untuk Embung Aji Raden	Masih dalam proses appraisal untuk pengadaan tanah seluas 21 Ha	Keterbatasan anggaran
12	Capaian penanganan sengketa pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017	Masih kurangnya SDM yang menangani permohonan sengketa	Terbatasnya kompetensi SDM yang memahami penanganan sengketa tanah
13	Belum terlaksananya penataan kawasan sesuai dengan RTBL yang telah disusun	Belum ditetapkannya RTBL yang telah disusun menjadi peraturan Wali Kota sebagai pedoman pembangunan	



## 2.2.2 Isu Strategis Daerah

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundangundangan, serta dengan memperhatikan potensi permasalahan yang dapat terjadi dan khususnya berpedoman pada isu strategis Kota Balikpapan yang ditetapkan dalam lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan
2. Penguatan SDM Berdaya Saing dan Perlindungan Sosial
3. Pengendalian, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
4. Infrastruktur Berkualitas Terpadu dan Penataan Utilitas Kota
5. Peningkatan Kota Cerdas dan Nyaman Huni
6. Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif
7. Maju sebagai Mitra IKN

Berdasarkan ketujuh isu strategis Kota Balikpapan, maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang berkaitan erat terhadap isu Infrastruktur Berkualitas Terpadu dan Penataan Utilitas Kota, sehingga dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagaimana terurai dalam tabel di bawah.



**Tabel 2.9**  
**Identifikasi Isu Strategis Perangkat Daerah**

Potensi yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Regulasi Administrasi pertanahan yang jelas	Belum tertibnya Administrasi Pertanahan	TBP. 11. Perencanaan dan koordinasi perencanaan penataan ruang untuk optimalisasi lahan hunian	Konflik dan sengketa serta kurangnya kepastian hukum atas hak tanah	Kementerian ATR: Lemahnya ketetapan dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang serta penguasaan dan pengelolaan tanah yang kompleks	Pengadaan Tanah dalam rangka mendukung Pembangunan IKN	penyelesaian penanganan konflik/sengketa pertanahan dan pengadaan tanah pembangunan kepentingan u
Pengembangan infrastruktur yang terintegrasi	Penataan kawasan yang belum tertata beserta jaringan utilitasnya yang meningkatkan estetika kota		Pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan banyaknya kawasan yang tersedia	Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatkan bangunan dan lingkungan yang lebih tertata	Penataan kawa mendukung pengembangan infrastruktur y terintegrasi da berkelanjutan
Tersedianya Pusat Informasi dan Layanan Tata Ruang Kota Balikpapan	Belum terintegrasinya RDTR Kota Balikpapan ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).		Perubahan Iklim	Kementerian ATR: Lemahnya ketetapan dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang serta penguasaan dan pengelolaan tanah yang kompleks	Terselesaikannya Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (masih mau di koordinasikan dengan provinsi)	belum optimal ketidaksesuaia pemanfaatan r



# DOKUMEN RANCANA STRATEGIS 2025-2029

Berdasarkan identifikasi masalah dan isu - isu strategis, maka dapat disimpulkan permasalahan pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan sebagai berikut:

- a. Masih lemahnya pengendalian pemanfaatan tata ruang;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam hal penyediaan basis data;
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi dokumen pertanahan yang dimiliki;
- d. Belum tercapainya kesepakatan antara pihak yang bersengketa;
- e. Perubahan desain jalan masuk Institut Teknologi Kalimantan (ITK);
- f. Belum tercapainya kesepakatan antara pihak / instansi terkait untuk memfasilitasi percepatan kelengkapan dokumen persyaratan pembayaran ganti rugi;
- g. Keterbatasan anggaran;
- h. Terbatasnya kompetensi Sumber Daya Manusia yang memahami penanganan sengketa tanah;

### **3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kota Balikpapan akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah DPPR Kota Balikpapan yang telah dirumuskan dalam RPJMD.

Perumusan tujuan dan sasaran DPPR Kota Balikpapan tahun 2025-2029 sebagaimana ditampilkan dalam tabel 3.1 di bawah ini:



**Tabel 3.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<b>SASARAN RPJMD :</b> Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang dan Penyelenggaraan Pertanahan yang tertib, dan berkelanjutan		Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Tertib Administrasi Pertanahan (Indeks)	-	36.04	37.63	39.13	40.69	42.23	45.29	
		Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase area dengan penataan sesuai dengan standar perencanaan (%)	8,92	9,15	9,53	9,9	10,11	10,53	10,81	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	72,07	73,85	75	76,5	78	79	80	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pertanahan	Indeks tertib administrasi pertanahan (Poin)	-	0,1	0,33	0,33	0,47	0,58	0,73	
		Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan Peraturan Tata Ruang yang berlaku di Kota Balikpapan	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang (Nilai)	-	60	62,5	65	67,5	70	75	



Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan proses yang terstruktur dan sistematis, dirancang untuk memastikan setiap PD memiliki peta jalan yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama lima tahun ke depan. Dokumen ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi turunan langsung dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi, dan program prioritas kepala daerah. Karena itu, setiap langkah penyusunan Renstra PD harus diarahkan untuk mendukung fokus pembangunan daerah dan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Setiap tahap penyusunan Renstra PD memiliki keterkaitan erat dengan fokus pembangunan daerah. Persiapan memastikan arah yang tepat sejak awal, rancangan awal dan rancangan Renstra membentuk kerangka strategis yang selaras dengan RPJMD, forum perangkat daerah memastikan keterlibatan publik dan relevansi, rancangan akhir memformalkan target kinerja, dan penetapan menjadikannya panduan kerja yang sah. Dengan demikian, Renstra PD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan peta jalan yang memandu seluruh gerak organisasi untuk mencapai pembangunan yang terukur, terarah, dan berdampak nyata selama lima tahun. Berikut disajikan penahapan Renstra pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD untuk mendukung fokus Pembangunan dalam RPJMD seperti pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.2**

**Penahapan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang**

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penilaian PKKPR Penyusunan insentif dan disinsentif	Penyusunan Perkada RDTR WP 1	Penyusunan Perkada RDTR WP 2	Penyusunan Ranperkada Site Plan	Penyusunan Perkada RDTR WP 3
Pengembangan Aplikasi Layanan Pertanahan	Penyusunan Revisi Peraturan Daerah tentang IMTN	Penyusunan Revisi Peraturan Daerah tentang IMTN	Penyusunan Revisi Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Pengaturan	Pengembangan aplikasi layanan pertanahan sesuai dengan Perubahan Aturan yang berlaku



Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			Pelaksanaan IMTN	
Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Embung Aji Raden	Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Embung Aji Raden	Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Jalan Masuk Institut Teknologi Kalimantan (ITK)	Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Jalan Masuk Institut Teknologi Kalimantan (ITK)	Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Jalan Masuk Institut Teknologi Kalimantan (ITK)
Penataan Kawasan Stadion Batakan, Lanjutan Penataan Kawasan Jl. Letjend Suprpto (simpang RSIA- Simpang Klinik Ida Kartika), Penataan Kawasan Jl. Letjend Suprpto (SPBU Karang Anyar- SPBU Bank Mandiri)	Lanjutan Penataan Kawasan Jl. Letjend Suprpto ( Simpang Klinik Ida Kartika- Simpang Jl. 21 Januari)	Penataan Kawasan A. Yani SPBU – Simpang Rapak, Pembangunan Landmark Balikpapan Tengah	Penataan Kawasan Jl. Sei Wain – Kebun Raya Balikpapan, Lanjutan Pembangunan Landmark Balikpapan Tengah	Penataan Kawasan Jl. Sei Wain (Kebun Raya Balikpapan – Gudang Peluru), Penataan Kawasan Jl. Soekarno Hatta – Gerbang Tol Balsam

3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan pertimbangan terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, maka Strategi serta Arah Kebijakan yang dipilih oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.3





Arah Kebijakan Rentsra Perangkat Daerah

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
Keadilan dalam penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah	1. Pembangunan sesuai dengan peruntukkan ruang wilayah yang berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup.  2. Pengembangan ekonomi hijau dalam rangka membangun ketangguhan terhadap perubahan iklim.	Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dan tanah untuk pembangunan yang tertib, aman, nyaman, dan berkelanjutan berarti memastikan setiap aktivitas pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan peruntukan lahan yang telah ditetapkan, sehingga menghindari konflik fungsi lahan, mengurangi risiko bencana, serta menjaga kelestarian lingkungan. Langkah ini mencakup pengendalian perizinan, pengawasan pemanfaatan lahan, penegakan hukum terhadap pelanggaran , dan penerapan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Dengan pengelolaan ruang yang tepat, kawasan dapat berkembang secara teratur, memberi rasa aman dari ancaman bencana, menciptakan kenyamanan bagi masyarakat melalui tata lingkungan yang harmonis, serta menjamin keberlanjutan sumber daya ruang bagi generasi mendatang	
Penyusunan dan penetapan RDTR yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Urusan Penataan Ruang yang Berlaku			
Penegakan pelanggaran tata ruang berdasarkan prosedur sanksi administratif			
Penataan Bangunan dan lingkungan harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya dan lingkungan hidup		Peningkatan penataan bangunan dan lingkungan yang tertib, aman, berkelanjutan, dan estetis merupakan upaya untuk mewujudkan keteraturan tata ruang, keselamatan konstruksi, kelestarian lingkungan, serta nilai estetika kawasan secara terpadu. Kegiatan ini dilakukan melalui pengaturan dan pengendalian pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan, penerapan standar teknis bangunan yang memenuhi aspek keselamatan dan kenyamanan, integrasi konsep ramah lingkungan seperti efisiensi energi dan penyediaan ruang terbuka hijau, serta penataan fasad dan lanskap yang mendukung keindahan visual lingkungan. Dengan pelaksanaan penataan yang terencana dan terukur, diharapkan tercipta lingkungan binaan yang fungsional, nyaman, menarik secara visual, dan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.	

## PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

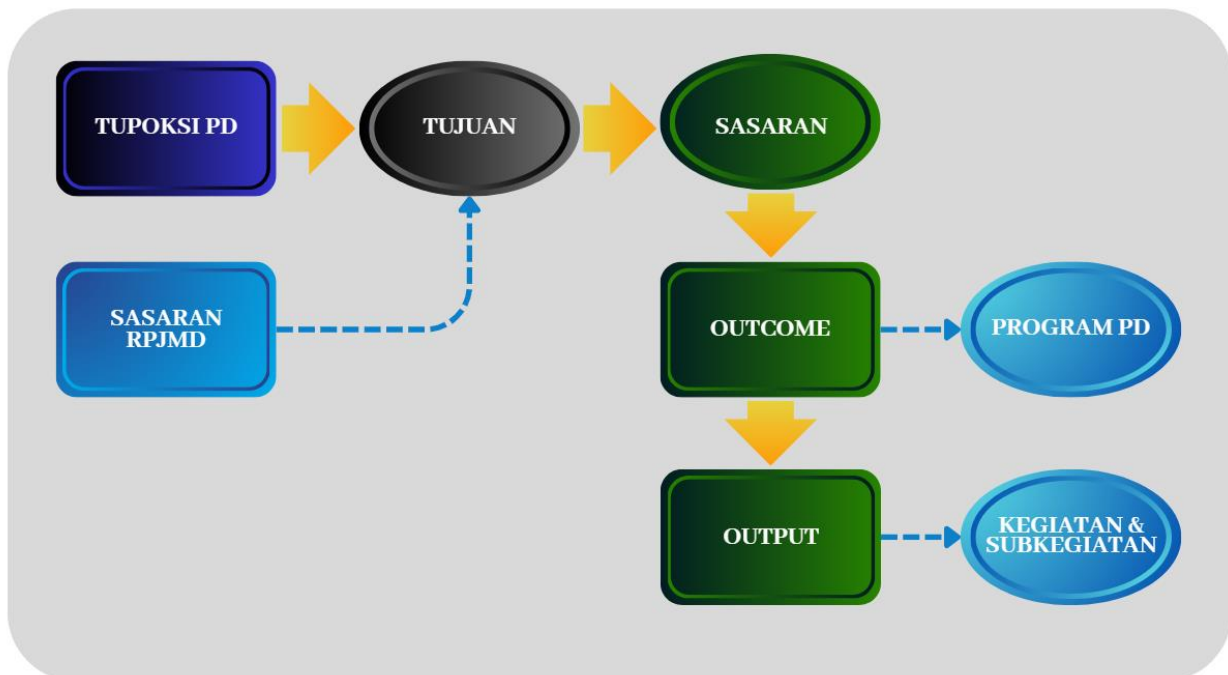
## BAB IV

### 4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja

Program, kegiatan dan subkegiatan pada Renstra PD disusun mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Dalam menyusun perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra, Perangkat Daerah menggunakan kerangka sebagaimana Gambar 4.1 dan perumusan yang dipaparkan pada tabel 4.1 berikut ini:

**Gambar 4.1**

**Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD**



Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

**Tabel 4.1**

**Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan tata ruang dan tanah yang tertib, aman, nyaman dan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Meningkatnya penataan bangunan fasilitas umum	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Tertib Administrasi Pertanahan (Indeks)		
					Persentase area dengan penataan sesuai dengan standar perencanaan (%)		
					Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
					Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (Orang)	1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
					Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (Orang)	1.03.09.2.01.0012 - Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)			
				Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.10.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.10.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.10.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.10.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Laporan realisasi anggaran perangkat daerah secara berkala dan akuntabel	2.10.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.10.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	2.10.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Data dan dokumen administrasi kepegawaian		



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
				perangkat daerah yang tertib dan akuntabel	Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.10.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.10.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2.10.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2.10.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.10.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.10.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.10.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Laporan pelaksanaan administrasi umum dan pengelolaan sarana perkantoran secara efektif dan efisien	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.10.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.10.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.10.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.10.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.10.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.10.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.10.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.10.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.10.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.10.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.10.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.10.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.10.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.10.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.10.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.10.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.10.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.10.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.10.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.10.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.10.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.10.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.10.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.10.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.10.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.10.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.10.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.10.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.10.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.10.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Barang milik daerah dalam kondisi baik dan fungsional melalui kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.10.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.10.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.10.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.10.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.10.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.10.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.10.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.10.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pertanahan			Indeks tertib administrasi pertanahan (Poin)		
					Persentase Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi (%)	2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
			Meningkatnya penyelesaian mediasi kasus sengketa tanah	Presentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan (IMTN) yang Dilakukan Melalui Mediasi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2.10.04.2.01.0004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan		Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.04.2.01.0005 - Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase Luas Tanah yang Dibebaskan (%)	2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
				Terlaksananya tahapan pengadaan tanah oleh DPPR	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan (Laporan)	2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan (Laporan)	2.10.05.2.01.0005 - Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya pemanfaatan tanah atas IMTN			Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan (%)	2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	
				Presentase luas tanah yang telah dimanfaatkan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam	2.10.09.2.01 - Penerbitan Izin Membuka Tanah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
		Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan Peraturan Tata Ruang yang berlaku di Kota Balikpapan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Tersusunnya dokumen penetapan kebijakan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	rangka Pemberian Izin Membuka Tanah (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah (Dokumen)	2.10.09.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	
					Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang (Nilai)		
					Nilai Kualitas Pengaturan, Pembinaan, Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Nilai)	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
					Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
						Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
					Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	
					Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)	1.03.12.2.01.0007 - Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	
					Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	
				Terlaksananya sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)	1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)	1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)	1.03.12.2.02.0004 - Penyusunan Peta Dasar	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
					Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	1.03.12.2.02.0006 - Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	
					Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)	1.03.12.2.02.0008 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	
				Terlaksananya kegiatan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)	1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)	1.03.12.2.03.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	
					Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
					Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
					Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	1.03.12.2.03.0007 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	
				Terlaksananya kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang (Dokumen)	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan (Dokumen)	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat (Dokumen)	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal (Berita Acara)	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang (Berita Acara)	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
						Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Dokumen)	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
					Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)	1.03.12.2.04.0007 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	
					Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	1.03.12.2.04.0008 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)	1.03.12.2.04.0009 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	
					Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan (Dokumen)	1.03.12.2.04.0010 - Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	

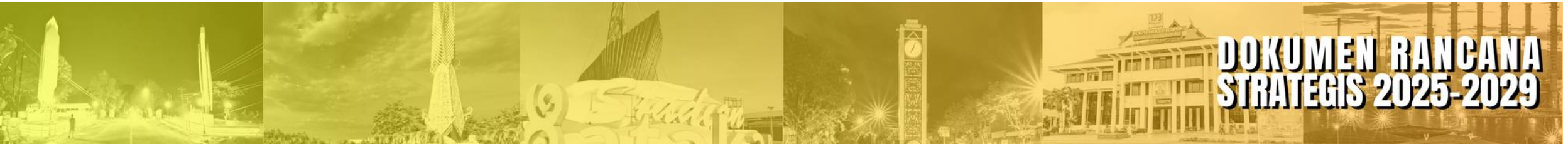
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
					Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat (Dokumen)	1.03.12.2.04.0011 - Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	
					Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Dokumen)	1.03.12.2.04.0012 - Penilaian Perwujudan RTR	
					Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang (Berita Acara)	1.03.12.2.04.0013 - Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	
					Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang (Dokumen)	1.03.12.2.04.0014 - Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	
					Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal (Berita Acara)	1.03.12.2.04.0015 - Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	



Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025 – 2029 yang mengacu pada program dan kegiatan serta pendanaan pada dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, yang selanjutnya dipedomani dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebagaimana dipaparkan melalui Tabel 4.2.

**Tabel 4.2**  
**Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERALOKASI PENAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					40.492.967.000		50.265.346.000		47.986.681.500		56.611.775.375		42.000.626.000	
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					33.357.967.000		40.925.418.000		36.436.311.000		45.252.196.000		27.452.196.000	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)	96,9	100	100	33.357.967.000	100	40.925.418.000	100	36.436.311.000	100	45.252.196.000	100	27.452.196.000	Dina men Pekerj Per
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					7.135.000.000		9.339.928.000		11.550.370.500		11.359.579.375		14.548.430.000	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Nilai Kualitas Pengaturan, Pembinaan, Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Nilai)	0	0	0,66	7.135.000.000	0,68	9.339.928.000	0,68	11.550.370.500	0,69	11.359.579.375	0,7	14.548.430.000	Dina men Pekerj Per
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					65.276.215.700		64.350.000.000		72.359.431.500		66.141.259.625		84.435.000.000	



# DOKUMEN RANCANA STRATEGIS 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAKTOR / PENANJANG
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.847.931.000		12.945.000.000		13.035.000.000		13.330.000.000		13.980.000.000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	85	85	86	12.847.931.000	87	12.945.000.000	88	13.035.000.000	89	13.330.000.000	90	13.980.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					30.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000	
Meningkatnya penyelesaian mediasi kasus sengketa tanah	Persentase Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi (%)	80	80	85	30.000.000	90	55.000.000	93	55.000.000	95	55.000.000	100	55.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					52.148.284.700		51.000.000.000		58.894.431.500		52.356.259.625		70.000.000.000	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Luas Tanah yang Dibebaskan (%)	-	0	31,43	52.148.284.700	31,43	51.000.000.000	41,19	58.894.431.500	45,25	52.356.259.625	56,66	70.000.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					250.000.000		350.000.000		375.000.000		400.000.000		400.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan tanah atas IMTN	Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan (%)	87	87	87,5	250.000.000	87,5	350.000.000	88	375.000.000	88	400.000.000	88,5	400.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
TOTAL KESELURUHAN					105.769.182.700		114.615.346.000		120.346.113.000		122.753.035.000		126.435.626.000	

## 4.2. Program Pendukung Prioritas

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, sebagaimana disajikan pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas  
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.10.1.03.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG				
1.	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	
2.	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
			1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.02.0004 - Penyusunan Peta Dasar	
			1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	
			1.03.12.2.03.0007 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	
			1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.04.0008 - Penilaian	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.10.1.03.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG				
			Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	
			1.03.12.2.04.0010 - Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	
			1.03.12.2.04.0011 - Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	
			1.03.12.2.04.0012 - Penilaian Perwujudan RTR	
			1.03.12.2.04.0015 - Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	
3.	2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Meningkatnya penyelesaian mediasi kasus sengketa tanah	2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.10.04.2.01.0004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
4.	2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.10.05.2.01.0005 - Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
5.	2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Meningkatnya pemanfaatan tanah atas IMTN	2.10.09.2.01 - Penerbitan Izin Membuka Tanah	
			2.10.09.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	

### 4.3. Indikator Kinerja Utama

Tujuan dan sasaran RPJMD yang berkaitan dengan urusan pertanahan dan penyelenggaraan penataan ruang merupakan acuan dalam penentuan indikator kinerja PD. Kondisi kinerja dan target capaian setiap tahun pada rencana strategis PD diselaraskan dengan kinerja pada awal tahun periode maupun akhir periode RPJMD.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan dengan Dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja DPRD Kota Balikpapan harus diarahkan

untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan DPRD yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Dalam melaksanakan kinerja di bidang pertanahan dan tata ruang telah ditetapkan indikator kinerjanya sebagai tolak ukur keberhasilan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan urusan pertanahan dan penyelenggaraan penataan ruang di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dengan target kinerja yang telah ditentukan dalam kurun waktu 2025-2029 adalah sebagaimana tabel berikut:



**Tabel 4.4**  
**Indikator Kinerja Utama PD (IKU)**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2.10.1.03.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG								
2	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	36,04	37,63	39,13	40,69	42,23	45,29	
3	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Nilai	60	62,5	65	67,5	70	75	
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,85	75	76,5	78	79	80	
5	Persentase area dengan penataan sesuai dengan standar perencanaan	%	9,15	9,53	9,9	10,11	10,53	10,81	
6	Indeks tertib administrasi pertanahan	Poin	0,1	0,33	0,33	0,47	0,58	0,73	

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Kunci**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
2	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Tertib Administrasi Pertanahan	positif	Indeks	-	36,04	37,63	39,13	40,69	42,23	45,29	
3	Persentase area dengan penataan sesuai dengan standar perencanaan	positif	%	8,92	9,15	9,53	9,9	10,11	10,53	10,81	
4	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	positif	Nilai	-	60	62,5	65	67,5	70	75	
5	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	positif	%	96,9	100	100	100	100	100	100	
6	Nilai Kualitas Pengaturan, Pembinaan, Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	positif	Nilai	0	0	0,66	0,68	0,68	0,69	0,7	
7	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal		%	100	100	100	100	100	100	100	
8	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
9	Nilai AKIP Perangkat Daerah	positif	Nilai	72,07	73,85	75	76,5	78	79	80	
10	Indeks tertib administrasi pertanahan	positif	Poin	-	0,1	0,33	0,33	0,47	0,58	0,73	
11	Persentase Luas Tanah yang Dibebaskan	positif	%	-	0	31,43	31,43	41,19	45,25	56,66	
12	Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan	positif	%	87	87	87,5	87,5	88	88	88,5	
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	positif	Nilai	85	85	86	87	88	89	90	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14	Persentase Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi	positif	%	80	80	85	90	93	95	100	
15	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee		%	0	0	0	0	0	0	0	
16	Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	



Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029 ini merupakan dokumen penjabaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029 dan dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan pertanahan dan tata ruang yang lebih terukur dan akuntabel. Perencanaan strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan memuat visi dan misi Kota Balikpapan serta tujuan sasaran dan cara mencapai tujuan kebijaksanaan serta program kinerja yang harus dilaksanakan sehingga secara bertahap dapat mendukung *Konsisten Menjaga Lingkungan Hidup yang Sehat dan Nyaman untuk Semua*.

Pelaksanaan Renstra ini akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan kebijakan nasional, dinamika pembangunan daerah, serta kebutuhan organisasi. Evaluasi tersebut juga akan menjadi dasar dalam penyesuaian strategi guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Demikian Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029 ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 sampai dengan 2029 bagi seluruh aparatur dalam lingkungan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta merupakan pedoman penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan. Akhir kata semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

## K. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan Visi Balikpapan sebagai Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan sesuai kewenangannya berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup. perencanaan ini dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029 atau disebut Dokumen Renstra DLH untuk periode 5 (lima) tahun.

Dokumen ini adalah penjabaran operasional dari Visi, Misi dan Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2025 - 2029. Dokumen ini bersifat indikatif, yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator spesifik dan terukur pada level organisasi.

Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah didasarkan pada Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2025, dimana terdiri dari tahapan:

- a. Persiapan Penyusunan Renstra;
- b. Pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratik Renstra;
- c. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra;
- d. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Ranwal Renstra;
- e. Pengajuan Ranwal Renstra;
- f. Pembahasan dan Penyepakatan Renstra;
- g. Konsultasi Ranwal Renstra;
- h. Peyampaian Ranwal Renstra dan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah (PD);
- i. Forum PD/Lintas PD;
- j. Verifikasi Rancangan Renstra PD;
- k. Perumusan Rankhir Renstra PD;
- l. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir Renstra;
- m. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD;
- n. Penetapan Renstra PD.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara integratif dan sinergi dengan dokumen-dokumen perencanaan yang lainnya, mulai dari tingkat pusat dan provinsi. Hal ini dilakukan agar ada koordinasi dan sinkronisasi berbagai program, serta agar saling mendukung dan menghindari adanya tumpang tindih program/kegiatan. Pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan bisa memberi manfaat yang lebih besar pada masyarakat Kota Balikpapan.

Selanjutnya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan keberadaan RKPD tersebut akan dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023.

Maka penjabaran RPJMD dan RKPD untuk setiap tahunnya juga akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Balikpapan.

#### **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan, perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;

22. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Kota Balikpapan;
23. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
24. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Balikpapan;
25. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2045;
26. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043;
27. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan;
28. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
29. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029;
30. Dokumen Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2024-2043;
31. Dokumen Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029; dan
32. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan 2025 - 2029 adalah untuk penyelarasan dan penentuan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan berdasarkan tantangan dan isu strategis yang dihadapi dengan mengacu pada dokumen Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD Kota Balikpapan 2025 - 2029.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan adalah:

1. Menjadi pedoman dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
2. Sebagai tolak ukur indikator kunci keberhasilan dan media akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan;
3. Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang dapat dicapai sesuai target dan berorientasi pada hasil.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang terdiri dari 5 Bab, sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Mengambarkan Pelayanan Perangkat Daerah serta Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menjelaskan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

**BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Berisikan Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah serta Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

**BAB V PENUTUP**

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup**

**2.1.a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, serta tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup didasari oleh Peraturan Wali Kota Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas, DLH Kota Balikpapan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. penyusunan program dan kegiatan Tata Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam, kebersihan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- c. pengkajian teknis dan pemberian rekomendasi di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan analisa dan evaluasi kegiatan yang mempunyai dampak lingkungan;
- e. pengawasan dan pengendalian sumber/kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan;
- f. penentuan baku mutu lingkungan;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan penegakan hukum lingkungan, baik secara administrasi, perdata maupun pidana;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah;
- i. pelaksanaan pemeliharaan dan pelestarian serta peningkatan konservasi sumber daya alam;
- j. penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta pemulihan sumber daya alam dan kualitas lingkungan;
- k. penyediaan data, informasi dan pengembangan kapasitas lingkungan;
- l. penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah;
- m. pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau dan pemakaman;
- n. pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan keanekaragaman hayati;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi lima tahun kedepan, DLH Kota Balikpapan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 2 (dua) Kepala Subbagian, 2 (dua) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel II.1**  
**Jabatan Struktural DLH**

Nama Bidang	Nama Sub / Seksi
Sekretariat	1. Sub Bagian Keuangan 2. Sub Bagian Umum 3. Kelompok Jabatan Fungsional
Bidang Tata Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam	4. Kelompok Jabatan Fungsional
Bidang Kebersihan	5. Kelompok Jabatan Fungsional
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	6. Kelompok Jabatan Fungsional
Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	7. Kelompok Jabatan Fungsional
Unit Pelaksana Teknis	8. UPTD Kebun Raya Balikpapan 9. UPTD TPAS Manggar

Sumber: DLH, 2025

Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan pembangunan berkelanjutan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, DLH didukung oleh berbagai bidang dan subbagian yang memiliki fungsi spesifik sesuai kewenangannya. Berikut rangkuman tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan struktur organisasi yang berlaku:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 

Kepala Dinas bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup. Fungsinya meliputi perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan, pengkajian teknis dan pemberian rekomendasi, pelaksanaan evaluasi dampak lingkungan, pengawasan dan pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan, penegakan hukum lingkungan, pemeliharaan dan konservasi sumber daya alam, penyediaan data dan informasi, serta pembinaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan sampah.
2. Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup
 

Membantu Kepala Dinas dalam pelayanan teknis dan administrasi seluruh unit organisasi. Fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut :

  - a. Mengatur proses perencanaan dan pelaksanaan program DLH;
  - b. Menyusun renstra, renja, rencana kinerja tahunan, dan laporan kinerja;
  - c. Mengelola ketatausahaan, arsip, dan pembinaan pegawai;
  - d. Mengatur pembiayaan dan penerimaan retribusi daerah;
  - e. Mengelola publikasi, dokumentasi, dan layanan informasi;
  - f. Membina standar pelayanan dan survei kepuasan masyarakat;
  - g. Mengembangkan sistem informasi dan koordinasi data;
  - h. Mengawasi, menilai, dan melaporkan pelaksanaan program.

Subbagian:

  - a. Subbagian Umum
 

Menangani administrasi umum, arsip, sarana-prasarana, perjalanan dinas, inventaris, kehumasan dan administrasi kepegawaian.
  - b. Subbagian Keuangan
 

Mengelola perencanaan anggaran, akuntansi keuangan, verifikasi retribusi, dan laporan keuangan.

c. Substansi Program

Menyusun dokumen perencanaan dan kinerja, memantau pelaksanaan program, mengelola data dan pelayanan publik.

3. Bidang Tata Lingkungan

Bidang ini fokus pada perencanaan dan pengelolaan lingkungan. Tugasnya meliputi inventarisasi data SDA, penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), indeks kualitas lingkungan, penentuan daya dukung dan daya tampung, penyusunan instrumen ekonomi lingkungan, serta penilaian dan persetujuan dokumen lingkungan. Selain itu, bidang ini juga menangani perlindungan, pemanfaatan, dan konservasi SDA, termasuk pengelolaan keanekaragaman hayati dan sistem informasinya.

4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Bidang ini bertugas:

- a. menyusun informasi, kebijakan, dan target pengelolaan sampah;
- b. membina kegiatan pengurangan, pendauran ulang, pemanfaatan kembali, serta penggunaan material ramah lingkungan;
- c. menyediakan sarana prasarana pengolahan sampah;
- d. merencanakan lokasi TPS, TPST, dan TPA;
- e. serta mengawasi kinerjanya.

Selain itu, bidang ini juga menangani perizinan teknis pengelolaan limbah B3 sesuai kewenangan daerah, pembinaan pihak swasta dalam pengelolaan sampah, serta penanganan kondisi darurat terkait limbah B3.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Bidang ini bertugas:

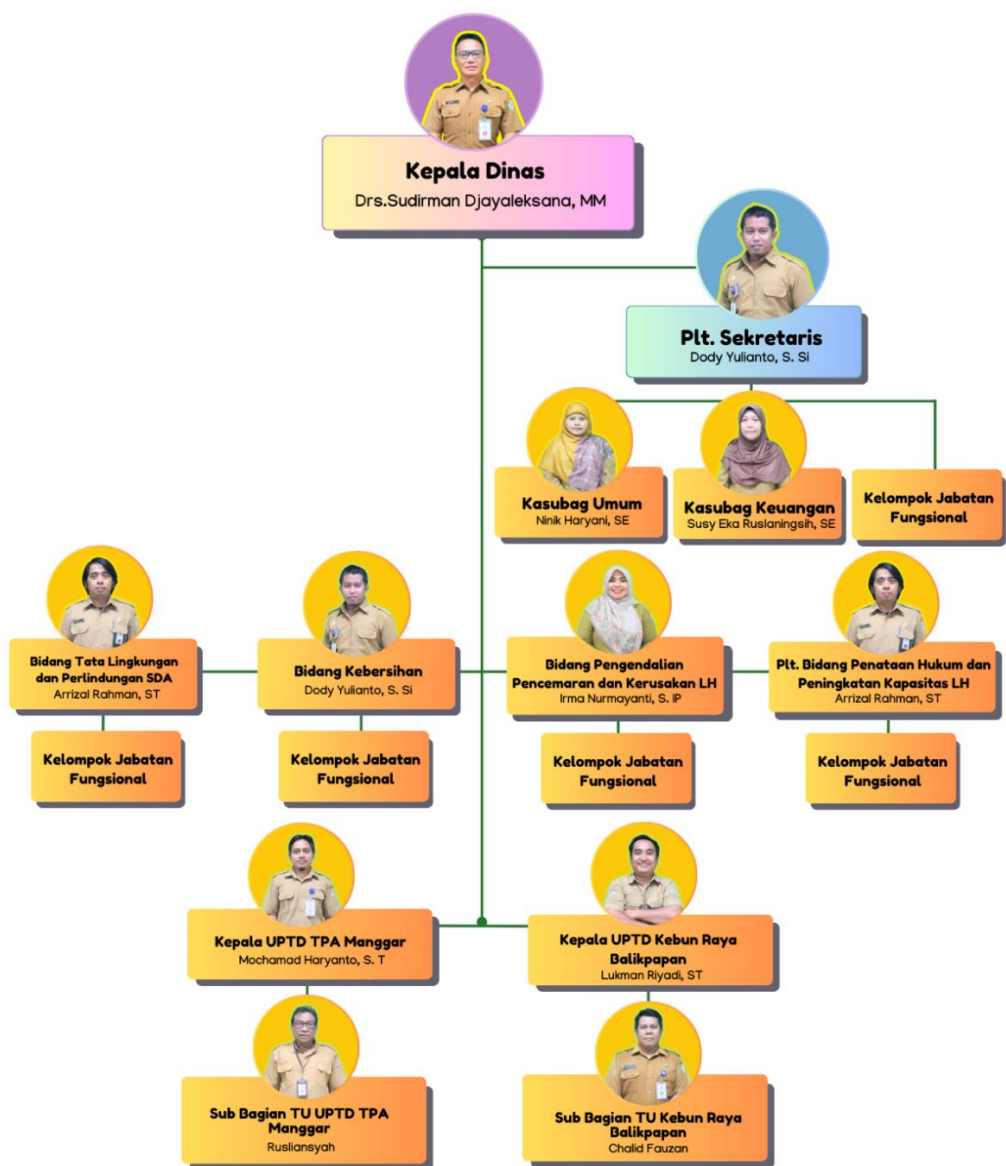
- a. memantau kualitas air, udara, dan tanah;
- b. menyediakan sarana pemantauan (termasuk laboratorium lingkungan);
- c. mengkoordinasikan penanggulangan dan pemulihan pencemaran;
- d. menyusun indeks kualitas lingkungan;
- e. serta melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui inventarisasi gas rumah kaca.

Bidang ini juga berwenang memberikan persetujuan teknis (misalnya pemenuhan baku mutu air limbah) dan rekomendasi teknis terkait pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan.

6. Bidang Penuatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang ini menangani pengaduan masyarakat terkait kasus lingkungan, melakukan verifikasi dan tindak lanjut, hingga penyelesaian sengketa. Selain itu, bidang ini berperan dalam pembinaan, pengawasan, serta penegakan hukum lingkungan, termasuk penyidikan perkara. Bidang ini juga mengembangkan kebijakan berbasis kearifan lokal, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan lingkungan, meningkatkan kapasitas penyuluh dan kelembagaan masyarakat peduli lingkungan, serta mengelola program penghargaan lingkungan hidup di tingkat daerah maupun nasional.





**Gambar 2.1**  
**Bagan Susunan Organisasi DLH Kota Balikpapan**  
 Sumber: DLH, 2025

**2.1.b. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup**

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, total sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan adalah sebagaimana tabel berikut.

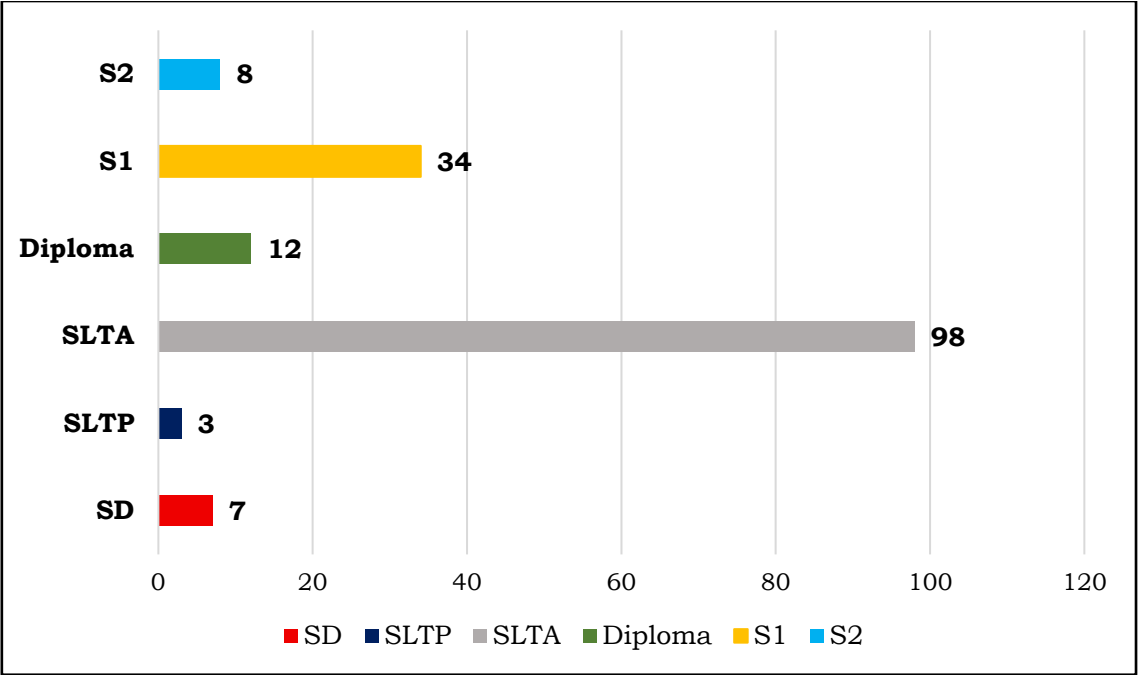
**Tabel II.1**  
**Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan, Pendidikan, Gender**

Jabatan	Golongan				Pendidikan						Gender	
	IV	III	II	I	S 2	S1	Dipl	SLTA	SLTP	SD	L	P
Kepala Dinas	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Sekretaris Dinas												
Kepala Bidang	3				3						2	1
Kasubag		4				3	1				2	2
Kepala UPTD		2				2					2	
Fungsional	2	13	2		3	9	1				7	10

Jabatan	Golongan				Pendidikan						Gender	
	IV	III	II	I	S 2	S1	Dipl	SLTA	SLTP	SD	L	P
Bendahara												
Staf	1	24	103	7	1	20	10	98	3	7	83	52
Total	7	43	105	7	8	34	12	98	3	7	97	65
	162				162						162	
Jumlah ASN									162			
Jumlah Non PNS Adm. Perkantoran									7			
Jumlah Non PNS Petugas Pengangkutan Sampah									430			
Jumlah Non PNS Petugas Kebersihan Jalan									303			
Jumlah Non PNS Petugas Retribusi									8			
Jumlah Non PNS MRF dan ITF									49			
Jumlah Non PNS Petugas Pertamanan									230			
Jumlah Non PNS Petugas Pembibitan									80			
Jumlah Non PNS Petugas Pemakaman									84			
Jumlah Non PNS Penjaga Hutan									13			
Jumlah Non PNS UPTD Kebun Raya Balikpapan									16			
Jumlah Non PNS UPTD TPAS Manggar									32			
Jumlah Non ASN									1252			
Total ASN + Non ASN									1414			

Sumber: DLH, 2025

Dari Tabel II.2 tersebut dapat dijelaskan kondisi sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan ASN berjumlah 60 orang yang terdiri dari 57 orang PNS dan 3 orang PPPK, selain itu terdapat 1.363 orang non-ASN yang bekerja sebagai Tenaga Bantuan. Dengan jumlah sumber daya manusia yang ada, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efektif dan efisien.



**Gambar 2.1**  
**Data Eksisting ASN Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan menurut tingkat Pendidikan**  
Sumber: DLH, 2025

Berdasarkan **Gambar 2.2** mengenai data eksisting ASN pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan menurut tingkat pendidikan, terlihat bahwa mayoritas pegawai berpendidikan SLTA dengan jumlah 98 orang atau sekitar 60,49% dari total ASN. Posisi berikutnya ditempati oleh pegawai dengan kualifikasi S1 sebanyak 34 orang atau 20,99%, kemudian lulusan Diploma sebanyak 12 orang atau 7,41%, serta lulusan S2 berjumlah 8 orang atau 4,94%. Sementara itu, ASN dengan pendidikan SD tercatat sebanyak 7 orang atau 4,32%, dan lulusan SLTP sebanyak 3 orang atau 1,85%. Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur pendidikan ASN di DLH Kota Balikpapan masih didominasi oleh lulusan SLTA, meskipun terdapat pula pegawai dengan kualifikasi pendidikan tinggi (S1 dan S2) yang menjadi modal penting dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan.

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, DLH Kota Balikpapan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan gedung, inventaris, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik sehingga semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan data aset yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel II.2**  
**Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup**

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	Tanah	471.224,73	m <sup>2</sup>
2	Gedung/Bangunan	790,00	m <sup>2</sup>
3	Alat Berat	26	unit
4	Dump Truck	58	unit
5	Arm Roll	35	unit

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
6	Engkel	8	unit
7	Pick Up	38	unit
8	Sepeda Motor	127	unit
9	Mobil Tangki	11	unit
10	Kendaraaan Bermotor Beroda Tiga/ATV	29	unit
11	Sepeda	20	unit
12	Pemadat Sampah	3	unit
13	Belt Conveyor	4	unit
14	Mesin Bor Lain-lain	6	unit
15	Alat Pengolahan Air Kotor Lain-lain	3	unit
16	Station Wagon	18	unit
17	Gerobak	440	unit
18	Pompa	38	unit
19	Caravan	3	unit
20	Kursi roda	1	unit
21	Drone	5	unit
22	Mesin Ketam	1	unit
23	Mesin Gerinda	6	unit
24	Mesin Kompresor	3	unit
25	Mesin Las Listrik	4	unit
26	Perkakas Bengkel Lain-lain	5	unit
27	Bak Air	2	unit
28	Dongkrak	74	unit
29	Tool Kit Set	12	unit
30	Peralatan Tukang Besi Lain-lain	1	unit
31	Global Positioning System	40	unit
32	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	4	unit
33	Timbangan	14	unit
34	Chain Saw	46	unit
35	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lain-lain	1	unit
36	Container	134	unit
37	Lemari	60	unit
38	Alat Pencacah Hijauan	14	unit
39	Jala	65	unit

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
40	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1	unit
41	Alat Pengukur Kadar Air (Meisture Terter)	1	unit
42	Rak-rak Penyimpanan	10	unit
43	Alat Laboratorium Lain-lain	9	unit
44	Kubus Apung	180	unit
45	Mesin Ketik	13	unit
46	Mesin Calculator	10	unit
47	Mesin Penghitung Uang	3	unit
48	Mesin Foto Copy (Kertas Folio)	1	unit
49	Rak Besi/Metal	6	unit
50	Rak Kayu	5	unit
51	Filling Besi/Metal	18	unit
52	Peti Uang	3	unit
53	Alat Penghancur Kertas	5	unit
54	Papan Nama Instansi/Pengumuman	485	unit
55	White Board	6	unit
56	Copy Board/Elektrik White Board	1	unit
57	Mesin Absensi	9	unit
58	Overhead Projektor	5	unit
59	Alat Pengaman (Sinyal)	50	unit
60	Display	1	unit
61	Camera	55	unit
62	Rak Kayu	4	unit
63	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	2	unit
64	Meja	125	unit
65	Sofa	12	unit
66	Mesin Penghisap Debu	2	unit
67	Mesin Potong Rumput	37	unit
68	Lemari Es	2	unit
69	AC Unit	71	unit
70	Kipas Angin	4	unit
71	Exhause Fan	1	unit
72	Kompur Listrik	2	unit
73	Kompur Gas	2	unit

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
74	Piring	12	unit
75	Sendok Makan	6	unit
76	Sendok Teh	6	unit
77	Televisi	15	unit
78	Loudspeaker	10	unit
79	Sound System	4	unit
80	Wireless	11	unit
81	Megaphone	3	unit
82	Mic Conference	12	unit
83	Tangga Alumunium	2	unit
84	Dispenser	18	unit
85	Handy Cam	8	unit
86	Gorden	2	unit
87	Tempat sampah	212	unit
88	Tandon Air	17	unit
89	Cangkir	6	unit
90	Rotary Lamp	15	unit
91	P.C Unit	70	unit
92	Laptop/Note Book	80	unit
93	Printer	165	unit
94	Scanner	5	unit
95	Plotter	1	unit
96	Hardisk Eksternal	41	unit
97	Server	2	unit
98	Modem	1	unit
99	Proyektor + Attachment	4	unit
100	Microphone/Wireless Mic	1	unit
101	Professional Sound System	1	unit
102	Unintemuptible Power Supply (UPS)	60	unit
103	Digital Audio Storage System	1	unit
104	LCD / Infocus	6	unit
105	Power Supply	1	unit
106	Slide Projector	1	unit
107	Alat Penyimpan Data	11	unit

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
108	Kompas	2	unit
109	Amplifier	3	unit
110	Telephone (PABX)	1	unit
111	Handy Talky	163	unit
112	Facsimile	2	unit
113	Unit Transceiver UHF Portabel	1	unit
114	Antena VHF/FM Transportabel	1	unit
115	Senter	80	unit
116	Alat Uji Gas Buang	2	unit
117	Screen	1	unit
118	Stabilizer	5	unit
119	Peralatan Pencampur Kompos & Bio Stabilizer	3	unit
120	Generator	8	unit
121	Baterai (HT)	50	unit
122	Safety Can	213	unit
123	Alat Kesehatan Kerja Lain-lain	3	unit
124	Standard Gas Generator	1	unit
125	Mesin Proses Lain-lain - Pyrolysis	1	unit
126	Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain – ATV	1	unit
127	Mesin Kompresor	4	unit
128	Peralatan Tukang Kayu Lain-lain	1	unit
129	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	3	unit
130	Mesin Listrik Standar	3	unit
131	Rak Besi/Metal	2	unit
132	Tenda	52	unit
133	Mesin Jahit	3	unit
134	Tangga Aluminium	19	unit
135	Circuit Closed Television (CCTV)	24	unit
137	P.C Unit/Personal Komputer	67	unit
138	Alat Pemadam Kebakaran	11	unit
139	Cicle saw table	1	unit
140	Clino Meter	3	unit

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
141	Alat Pengukur suhu badan (Thermometer Gun)	4	unit
142	Wood Chipper	1	unit
143	Teropong	2	unit
144	Alat ukur PH tanah	1	unit

Sumber: DLH, 2025

**2.1.c. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup**

**1) Capaian Kinerja Organisasi**

Tingkat capaian kinerja DLH Kota Balikpapan berdasarkan sasaran/target pada Rencana Strategis DLH Kota Balikpapan 2020–2024 dapat dilihat pada berikut ini:



**Tabel II.3**  
**Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-	Realisasi Capaian Tahun ke-	Rasio Capaian pada Tahun ke-
					2020	2020	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Indeks Tutupan Lahan		Skor Indeks Tutupan Lahan		48.27	55.40	114.77
2	Meningkatnya Indeks Pencemaran Udara		Skor Indeks Pencemaran Udara		93.34	88.92	95.26
3	Meningkatnya Indeks Pencemaran Air		Skor Indeks Pencemaran Air		42.8	40.9	95.56
4	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Lingkungan Hidup		Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup		100%	100%	100.00
5	Meningkatnya Pengelolaan Sampah Kota Balikpapan		Persentase Pengangkutan Sampah ke TPA		61.41%	75.45%	122.86
			Persentase Pengolahan Sampah dari Sumbernya		24.80%	22.14%	89.27
6	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Ketaatan terhadap Hukum Lingkungan		Persentase sekolah adiwiyata		78%	82%	104.64

Sumber : Data Olahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025

**Tabel II.4**  
**Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dari Tahun 2021-2025**

NO	Sasaran Strategis	Target NSPK	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatkan Kualitas Lahan		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	48,32	65,33	65,33	65,33	65,43	69,49	50,32	48,91	55,20	48,91	143.81	77.02	74.87	84.80	77
2	Meningkatkan Kualitas Udara		Indeks Kualitas Udara (IKU)	93,84	89,02	89,12	89,22	89,32	88,52	84,29	89,98	86,28	89,98	94.33	94.69	100.96	96.70	95
3	Meningkatkan Kualitas Air (IKA)		Indeks Kualitas Air (IKA)	43,30	47,32	47,42	47,52	47,62	49,40	50	54,50	54,49	54,50	114.09	105.66	114.93	114.67	106
4	Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Lingkungan Hidup		Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup	100%	-	-	fsu-	-	100%	-	-	-		100.00	-	-	-	
5	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	-	81,15	81,18	81,20	81,22	-	77,76	79,21	81,28	78	-	95.82	97.57	100.10	96,12
5	Meningkatkan Pengelolaan Sampah		Persentase Pengangkutan Sampah ke TPA	60,91%	-	-	-	-	74,85%	-	-	-		122.89	- -	- -	-	
			Persentase Pengolahan Sampah dari Sumbernya	25,80%	-	-	-	-	24,13%	-	-	-		93.53	-	-	-	
6	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Ketaatan terhadap Hukum Lingkungan		Persentase sekolah adiwiyata	80%	-	-	-	-	84,40%	-	-	-		105.50				

NO	Sasaran Strategis	Target NSPK	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
8	Meningkatkan Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DLH Kota Balikpapan		Nilai Refomasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup		27					31,67					117.30			
9	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup		Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup	-	71	72	73	74	-	75,70	70,85	73,40	76,33	-	106,62	98,40	100,55	103.15

**Tabel II.5**  
**Capaian Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dari Tahun 2020**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-	Realisasi Anggaran pada Tahun ke-	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
	2020	2020	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	70,673,093,300	57,813,217,845	81.80
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4,480,000,000	1,736,910,593	38.77

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-	Realisasi Anggaran pada Tahun ke-	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
	2020	2020	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	6,855,000,000	3,967,503,439	57.88
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	825,000,000	391,998,341	47.51
PEMANTAPAN PROGRAM ADIWIYATA	200,000,000	108,151,000	54.08
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2,956,116,700	2,044,513,947	69.16
BELANJA TIDAK LANGSUNG	11,089,724,000	9,672,722,262	87.22

Sumber : DLH, 2025

**Tabel II.6**  
**Capaian Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dari Tahun 2021-2024**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30,286,890,047	17,097,187,893	19,982,635,334	21,431,456,553	19,982,635,334	25,065,925,265	15,542,607,965	16,893,016,816	19,087,487,377.48	16,893,016,816.00	82.76	90.91	84.54	89.06	84.54	21,756,161,032.20	18,696,410,847.90
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	297,999,736	99,996,200	1,454,998,700	229,990,700	1,454,998,700	233,463,704	98,134,980	1,394,466,560	224,153,357.00	1,394,466,560.00	78.34	98.14	95.84	97.46	95.84	707,596,807.20	668,937,032.20
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	5,453,811,925	28,810,089,958	52,341,436,966	54,469,995,172	52,341,436,966	4,893,674,165.75	26,840,553,411	47,441,855,603	48,290,960,967.43	47,441,855,603.00	89.73	93.16	90.64	88.66	90.64	38,683,354,197.40	34,981,779,950.04
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	99,643,000	119,999,700	124,602,950	145,073,700	124,602,950	80,016,230	98,181,785	105,905,300	97,700,632.00	105,905,300.00	80.3	81.82	84.99	67.35	84.99	122,784,460.00	97,541,849.40
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	956,150,954	1,034,999,265	2,552,791,650	1,672,999,475	2,552,791,650	888,127,356.65	957,276,658.65	2,409,421,341	1,587,133,288.00	2,409,421,341.00	92.89	92.49	94.38	94.87	94.38	1,753,946,598.80	1,650,275,997.06
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	34,988,500	199,999,700	247,519,700	300,000,000	247,519,700	33,853,000	166,230,600	240,256,300	289,374,476.00	240,256,300.00	96.75	83.12	97.07	96.46	97.07	206,005,520.00	193,994,135.20
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	1,695,113,028	50,000,000	580,000,000	118,113,800	580,000,000	1,437,060,187.24	48,367,415	84,425,641	61,921,808.00	84,425,641.00	84.78	96.73	14.56	52.43	14.56	604,645,365.60	343,240,138.45
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	79,000,000	105,000,000	335,097,100	196,140,000	335,097,100	78,015,950	99,380,030	265,329,768	175,958,592.00	265,329,768.00	98.75	94.65	79.18	89.71	79.18	210,066,840.00	176,802,821.60

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)																	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	528,053,500	284,996,500	1,565,589,300	1,250,000,000	1,565,589,300	467,715,844	264,276,759	1,527,898,084	1,195,420,522.20	1,527,898,084.00	88.57	92.73	97.59	95.63	97.59	1,038,845,720.00	996,641,858.64
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	50,113,893,160	88,296,554,996	80,359,644,841	106,566,125,048	80,359,644,841	45,329,791,190.99	83,000,860,530.21	76,697,800,466	101,504,357,243.12	76,697,800,466.00	90.45	94	95.44	95.25	95.44	81,139,172,577.20	76,646,121,979.26

Sumber : DLH, 2025

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2020-2025 **Tabel II.5** jika capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup periode 2021-2024 sudah menunjukkan kinerja yang positif. Berdasarkan tabel Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rasio capaian masing-masing pada tahun 2023 yaitu IKA 114,67% dan IKU 96,70%. Hal ini mengindikasikan jika berhasilnya program Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan kualitas air dan udara di Kota Balikpapan. Walaupun demikian, Indeks Kualitas Lahan belum mengalami peningkatan positif seperti IKA dan IKU, karena dari tahun 2022 sampai tahun 2023 mengalami penurunan nilai indeks dari 50,32% menjadi 48,91% di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan jika masih terdapat permasalahan yang menjadi tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan mengatasi mengenai masalah alih fungsi lahan. Selain itu, pada **Tabel II.4** dilihat rasio capaian tahun 2020 indikator pengangkutan sampah ke TPA (122,86%) menunjukkan angka positif yang mengindikasikan jika sistem pengangkutan sampah di Kota Balikpapan sudah cukup bagus, begitu juga dengan indikator lainnya yang menunjukkan angka positif yang mengindikasikan jika capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan terus meningkat tiap tahunnya. Namun, pengolahan sampah dari sumber masih berada dibawah target dengan capaian hanya 22,14% dari 24,80%. Capaian serupa terjadi pada periode 2022-2024, dimana indikator pengangkutan sampah terus meningkat namun pengelolaan sampah di sumber belum optimal, mengindikasikan bahwa pengelolaan sampah berbasis masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam permasalahan persampahan di Kota Balikpapan.

Pada **Tabel II.7** kinerja anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan pada periode 2021-2025 menunjukkan pelaksanaan kinerja yang cukup stabil, dengan program dan realisasi anggaran secara efektif. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup memiliki capaian realisasi tertinggi dengan rata-rata 91,89% yang mengindikasikan konsistensi dalam implementasi, begitu juga dengan program pengelolaan keanekaragaman hayati yang meningkat setiap tahunnya mencerminkan penguatan komitmen terhadap konservasi hayati, begitupun program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat konsisten menunjukkan realisasi diatas 95%, menegaskan bahwa pendekatan partisipatif berbasis komunitas menjadi salah satu strategi yang efektif dalam pengelolaan lingkungan hidup. Namun program pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menunjukkan performa terendah dengan rasio realisasi yang sangat rendah pada 2023 dan 2024, mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas perencanaan dan pelaksanaannya.

Secara keseluruhan, pencapaian indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan arah yang positif, namun perlu ditingkatkan dari sisi efektivitas pengelolaan sampah di sumber,

penyerapan anggaran pada program strategis Optimalisasi perencanaan anggaran yang selaras dengan capaian kinerja menjadi hal krusial agar pengelolaan lingkungan hidup di Kota Balikpapan dapat berjalan lebih efisien, terarah, dan berkelanjutan.

2) **Evaluasi Kinerja (LKjIP)**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan secara teknis disusun melalui analisis terhadap hal yang dijadikan standar pengukuran, yaitu pengukuran kegiatan kinerja dan pengukuran pencapaian sasaran serta akuntabilitas keuangan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dan kaitannya dengan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pada Renstra DLH Kota Balikpapan 2020-2024.

**Tabel II.7**  
**Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**  
**Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2025**

No	Uraian	Nilai				
		2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Perencanaan Kinerja	22,94	23,76	25,71	23,73	24,54
2	Pengukuran Kinerja	16,25	18,13	18,38	22,21	22,80
3	Pelaporan Kinerja	11,14	11,59	9,87	10,53	11,37
4	Evaluasi Kinerja	5,63	5,79	16,89	17,11	17,61
5	Capaian Kinerja	15,00	16,43	-	-	-
	Nilai Hasil Evaluasi	70,96	75,70	70,85	73,40	76,33
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB	BB

Sumber : Inspektorat Kota Balikpapan, 2025

Berdasarkan hasil Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan selama periode tahun 2021 sampai dengan 2025 memperoleh predikat BB (Sangat Baik). Hal ini menunjukkan secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan peningkatan untuk mendorong pencapaian kinerja yang lebih optimal ke depan. Adapun tindak lanjut atas rekomendasi Inspektorat sebagai berikut:

- a. DLH Kota Balikpapan melakukan pemantauan terhadap rencana Aksi secara berkala (per triwulan) terhadap seluruh target yang ada dalam rencana aksi.
- b. DLH Kota Balikpapan melakukan pengukuran kinerja berjenjang dari Kepala Seksi/Kasubag, Kabid, Sekretaris DLH Kota Balikpapan.



- c. Membuat SOP terkait pengumpulan data kinerja berbasis elektronik dari masing-masing pengampu sasaran strategis perangkat daerah.

#### **2.1.d. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Lingkungan Hidup**

Kelompok sasaran layanan merupakan pihak-pihak yang menerima manfaat dari Dinas Lingkungan Hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyebutan kelompok sasaran ini dimaksudkan agar arah kebijakan dan program dapat dirancang secara tepat sasaran serta selaras dengan tujuan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Berikut merupakan rincian arahan kelompok sasaran layanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan yang telah dipetakan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing bidang, serta diklasifikasikan ke dalam lima kategori kelompok sasaran layanan utama yang mencerminkan karakteristik penerima manfaat dari berbagai jenis layanan lingkungan.

##### **1) Pemerintah dan Aparatur Daerah**

Kelompok sasaran ini mencakup perangkat daerah (OPD), kecamatan, kelurahan, dan aparatur sipil negara yang terlibat dalam kegiatan lingkungan hidup, baik sebagai mitra program maupun objek pembinaan. Berikut merupakan layanan yang berkaitan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing bidang.

- (a) Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup** melayani OPD melalui program *Eco Office* untuk membangun budaya kerja ramah lingkungan di lingkungan perkantoran pemerintah.
- (b) Bidang Tata Lingkungan dan Perlindungan SDA** memberikan pendampingan dan verifikasi teknis kepada instansi pemerintah yang menjadi pemohon dokumen UKL-UPL.
- (c) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH** memberikan layanan penebangan/pemangkasan pohon yang diajukan oleh instansi pemerintahan, seperti Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan, dan sebagainya.

##### **2) Lembaga Pendidikan dan Institusi Sosial**

Kelompok ini merupakan target utama dalam program edukasi dan peningkatan kapasitas lingkungan berbasis sekolah dan komunitas. Berikut merupakan layanan yang berkaitan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing bidang.

- (a) Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup** membina berbagai sekolah dalam Program Adiwiyata di tingkat nasional, provinsi, kota, dan mandiri. Fasilitasi terhadap sekolah dilakukan melalui pembinaan rutin, penyuluhan, serta pelibatan aktif dalam kampanye lingkungan.

##### **3) Pelaku Usaha dan Industri**

Merupakan kelompok sasaran penting yang berkaitan erat dengan kewajiban pengelolaan dampak lingkungan dan tanggung jawab sosial lingkungan. Berikut merupakan layanan yang berkaitan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing bidang.

- (a) **Bidang Tata Lingkungan dan Perlindungan SDA** bertugas menerbitkan Persetujuan UKL-UPL kepada pelaku usaha sebagai bentuk persetujuan kegiatan yang berdampak lingkungan.
- (b) **Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH** memberikan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dan pengambilan serta pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan, khususnya untuk perusahaan dan industri.
- (c) **Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas LH** mengembangkan program *Eco Office* bagi perusahaan dan kantor swasta, sebagai upaya mendorong pelaku usaha menjalankan aktivitas yang efisien sumber daya dan ramah lingkungan.

#### 4) **Komunitas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**

Kelompok ini berperan sebagai penggerak di lapangan, mitra strategis dalam pelaksanaan program berbasis masyarakat, serta penjaga kepedulian lingkungan secara sosial. Berikut merupakan layanan yang berkaitan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing bidang.

- (a) **Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas LH** membina kelompok bank sampah yang terdiri atas komunitas atau LSM lokal untuk mendukung pengelolaan sampah dari sumbernya. Komunitas juga menjadi pelaksana dan mitra dalam kegiatan seperti Program Kampung Iklim (Proklam), baik kategori pratama, utama, maupun lestari. Dukungan diberikan melalui pelatihan, fasilitasi sarana prasarana, serta pembinaan berkelanjutan.

#### 5) **Masyarakat Umum dan Rumah Tangga**

Kelompok ini adalah penerima manfaat langsung dari layanan yang diberikan oleh DLH dalam pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, serta peningkatan kesadaran lingkungan. Berikut merupakan layanan yang berkaitan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing bidang.

- (a) **Bidang Kebersihan** memberikan pelayanan kepada seluruh warga Kota Balikpapan berupa:
  - (i) Layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah rumah tangga.
  - (ii) Fasilitasi sarana prasarana persampahan seperti TPS3R, komposter, *drop box*, dan lain-lain.
  - (iii) Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat secara langsung.
- (b) **Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas LH** mengadakan program:
  - (i) RT *Clean, Green, and Healthy* (CGH) sebagai bentuk penguatan partisipasi masyarakat pada tingkat rukun tetangga.
  - (ii) Penanganan pengaduan lingkungan dan sengketa, yang ditujukan langsung kepada masyarakat sebagai penerima maupun pelapor dampak lingkungan.

- (c) **Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH** melayani masyarakat atau pemohon yang berkaitan dengan permohonan penebangan pohon, yang sering berasal dari permukiman atau pemilik tanah pribadi.

**2.1.e. Mitra Dinas Lingkungan Hidup dalam Pemberian Pelayanan**

Mitra merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di bidang lingkungan hidup. Kerja sama ini dilakukan dalam berbagai bentuk, baik melalui pembiayaan, pelibatan teknis, maupun kolaborasi implementatif di lapangan. Berikut merupakan bentuk kerja sama Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan bersama mitra.

**1) Program Aksi Perubahan Bapak Asuh Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Balikpapan**

Program ini bertujuan untuk membangun kemitraan dalam kegiatan pembangunan, pemeliharaan, atau rehabilitasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Balikpapan. Kerja sama dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui Bidang Tata Lingkungan dan Perlindungan SDA, yang berkolaborasi dengan sejumlah perusahaan, instansi swasta (seperti perbankan), paguyuban masyarakat, hingga BUMN seperti PLN. Skema “Bapak Asuh” memungkinkan mitra untuk berkontribusi secara langsung dalam peningkatan kualitas dan fungsi RTH melalui dukungan finansial maupun teknis.

**2) Program *Waste to Energy for Community* (Wasteco)**

Program ini merupakan bentuk kolaborasi dalam pengelolaan gas metana hasil sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Manggar untuk diubah menjadi energi bermanfaat yang dapat digunakan oleh kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar. Kerja sama ini dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui Bidang Kebersihan, bekerja sama dengan Pertamina Hulu Mahakam (PHM). Melalui program ini, sampah tidak hanya ditangani sebagai limbah, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang mendukung konsep ekonomi sirkular dan berkelanjutan.

**3) Program *Wastedeveloper* (KSM)**

Program ini merupakan inisiatif pemberdayaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis partisipasi warga. Melalui program ini, masyarakat didorong untuk mengolah sampah rumah tangga menjadi produk bernilai ekonomi, seperti kompos dan kerajinan dari bahan daur ulang. Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai fasilitator dan pembina teknis, sementara KSM menjadi penggerak utama di lapangan. Program ini bertujuan mengurangi timbunan sampah di sumbernya sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat, sejalan dengan upaya penerapan ekonomi sirkular.

**4) Program Orchidarium KRB**

Program ini fokus pada pelestarian dan pengembangan koleksi anggrek di kawasan konservasi yang berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB). Orchidarium ini berfungsi sebagai sarana

pembibitan, penelitian, edukasi, dan rekreasi yang melibatkan komunitas lokal, akademisi, dan pemerhati lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup bersama mitra konservasi mengelola kegiatan ini untuk menjaga keanekaragaman hayati, memperkuat fungsi kawasan lindung, sekaligus memberi nilai tambah melalui potensi wisata alam.

**5) Clean, Green, and Healthy (CGH) Program Kampung Iklim/Bank Sampah**

Program ini merupakan dukungan terhadap Kampung Iklim (Proklim) yang diintegrasikan dengan sistem Bank Sampah, bekerja sama dengan Pertamina Hulu Mahakam (PHM). Melalui program ini, masyarakat diajak untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah secara mandiri. Sampah anorganik bernilai jual disalurkan ke Bank Sampah untuk didaur ulang, sedangkan sampah organik diolah menjadi kompos. Program ini tidak hanya berkontribusi pada pengendalian perubahan iklim, tetapi juga meningkatkan kemandirian ekonomi warga.

**6) BBJP TPA Manggar (PLN)**

Program ini merupakan kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan PLN dalam pemanfaatan Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) yang dihasilkan dari pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Manggar. BBJP digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk pembangkit listrik atau industri, sehingga dapat mengurangi timbunan sampah sekaligus menyediakan sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Program ini mendukung transisi energi bersih dan pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil.

## **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup**

### **2.2.a. Permasalahan**

Permasalahan pembangunan merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara capaian pembangunan saat ini dengan target yang telah direncanakan, serta antara kondisi eksisting dengan tujuan yang ingin dicapai di masa mendatang. Proses identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan untuk merumuskan program yang tepat dalam menjawab tantangan yang dihadapi oleh perangkat daerah. Identifikasi ini dilakukan berdasarkan kriteria tertentu agar menghasilkan daftar permasalahan yang benar-benar terjadi, dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang saat ini maupun dalam lima tahun ke depan.

Analisis terhadap isu-isu strategis dimaksudkan sebagai dasar dalam merumuskan permasalahan pembangunan, yang kemudian menjadi acuan dalam penetapan isu strategis yang memengaruhi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan pada periode 2025-2029. Berdasarkan tugas dan fungsi layanan yang diemban, pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel II.8**  
**Pemetaan Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup	Masih tingginya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan	Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian pencemaran air permukaan
		Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dan upaya mitigasi penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
		Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan
		Kurangnya sinkronisasi pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
		Belum optimalnya upaya pemenuhan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		Terbatasnya pengumpulan data lintas sektor dalam mendukung penyusunan kajian
		Belum optimalnya upaya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
		Belum optimalnya penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
		Belum seluruh usaha dan/atau kegiatan kewenangan kota diawasi dikarenakan keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM pengawas di tingkat daerah, baik dari segi jumlah maupun kompetensi teknis dalam pengawasan izin lingkungan
		Kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup
		Terbatasnya upaya penambahan dan diversifikasi jenis koleksi flora
		Kurangnya fasilitas pendukung wisata untuk mencapai target retribusi daerah
	Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah	Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan sampah
		Belum optimalnya upaya penanganan timbulan sampah yang semakin meningkat akibat adanya dinamika pembangunan kota dan pengembangan kawasan strategis nasional di wilayah sekitar
		Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan daur ulang sampah akibat belum tersedianya sistem pengelolaan sampah daur ulang yang efektif
		Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
		Belum optimalnya pengelolaan Limbah B3

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Terbatasnya kapasitas pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
	Belum optimalnya kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Belum terpenuhinya dukungan sistem manajemen pemerintahan daerah yang efektif, terintegrasi dan berbasis kinerja

Sumber: DLH, 2025

2.2.b. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dan daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penentuan isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan mempertimbangkan permasalahan, isu KLHS, serta isu lingkungan dinamis (global, nasional, dan regional).

- 1) **Telaahan Isu KLHS Relevan dengan Dinas Lingkungan Hidup**
- a) **Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

Dalam rangka memastikan bahwa dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan selaras dengan dengan pembangunan berkelanjutan, maka perlu dilakukan telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah disusun dalam dokuemn Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029. KLHS adalah instrument penting yang digunakan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Melalui telaahan ini, Dinas Lingkunan Hidup Kota Baikpapan dapat mengidentifikasi isu-isu strategis lingkungan hidup yang berkaitan dengan lingkup fungsi, tugas dan wewenang dari Dinas Lingkungan Hidup. Hasil telaahan isu stratgis dari KLHS RPJMD ini bisa menjadi salah satu dasar dalam merumuskan tujuan, sasaran dan strategi pembangunan berkelanjutan, serta memastikan bahwa pelaksaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.

Dalam dokumen KLHS RPJMD Kota Balikpapan 2025-2029 terdapat 7 point isu strategis yang berkaitan dengan isu permasalahan lingkungan diantaranya mengenai pencemaran dan degradasi lingkungan, keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan bencana, dan ketahanan pangan. Namun dari 7 isu strategis tersebut terdapat beberapa isu yang berkaitan langsung

dengan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup yaitu:

1. Keterbatasan Ketersediaan dan Kualitas Air Bersih

Dalam dokumen KLHS RPJMD dijelaskan jika capaian SDGs indikator 6.1.1 (a) dan 6.1.1 (C) persentase rumah tangga dan proporsi populasi yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak masih belum mencapai target nasional. Dimana diketahui jika masing masing capaian indikator yaitu untuk persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap kekayaan sumber air minum layak, yaitu 98,54% sedangkan untuk proporsi populasi yang memiliki akses terhadap akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan 99,1%.

2. Rendahnya Kualitas Udara Akibat Emisi GRK

Kualitas udara di Kota Balikpapan menjadi salah satu isu lingkungan strategis yang harus mendapatkan perhatian. Seiring meningkatnya laju pertumbuhan kota, aktivitas transportasi dan penggunaan energi berbasis fosil. Dalam Inventarisasi GRK Kota Balikpapan Tahun 2022, sektor transportasi tercatat sebagai penyumbang terbesar emisi CO<sub>2</sub> dengan proporsi lebih dari 50% dari total emisi kota. Kondisi ini berdampak langsung terhadap peningkatan suhu iklim mikro, penurunan kualitas udara ambien, serta risiko kesehatan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

Dengan kondisi tersebut, diperlukan strategi pengendalian emisi GRK dan peningkatan kualitas udara secara terintegrasi, hal ini bisa dilakukan dengan langkah-langkah seperti penguatan regulasi emisi kendaraan, pengembangan transportasi publik rendah emisi, perluasan pengelolaan RTH, serta edukasi dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas udara.

3. Kurang Optimalnya Pengelolaan Sanitasi, Limbah dan Sampah

Pengelolaan sanitasi, limbah dan sampah Kota Balikpapan masih menghadapi berbagai tantangan, baik di bidang infrastruktur, kelembagaan, maupun kesadaran masyarakat. Meskipun Kota Balikpapan telah menerima berbagai penghargaan dalam bidang lingkungan seperti adipura, namun dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi dan aktivitas ekonomi telah mendorong peningkatan timbulan sampah dan limbah domestik maupun non-domestik secara signifikan.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, timbulan sampah harian pada tahun 2023 kurang lebih 193.038 ton dengan komposisi didominasi oleh sampah organik. Namun, kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Manggar semakin terbatas dan diperkirakan akan mencapai beban maksimal dalam beberapa tahun ke depan. Pada aspek limbah, terutama limbah domestik cair

dan limbah B3, masih banyak ditemukan pembuangan tidak terkelola, baik dari rumah tangga maupun pelaku usaha kecil yang tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Hal ini berdampak pada pencemaran badan air permukaan seperti sungai Karang Mumus dan DAS Manggar, serta peningkatan risiko penyakit berbasis lingkungan.

Sementara itu, akses sanitasi layak dan aman masih menjadi persoalan di beberapa kawasan padat penduduk dan wilayah pesisir. Kurangnya sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat dan terbatasnya pengawasan terhadap instalasi pengolahan dari kawasan permukiman atau perkantoran menyebabkan beban pencemaran lingkungan terus meningkat, Permasalahan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sanitasi, limbah, dan sampah belum sepenuhnya terintegrasi dan berbasis sistem. Diperlukan langkah-langkah strategis berupa peningkatan kapasitas pengelolaan TPA, perluasan program bank sampah dan pemilahan di sumber, pengembangan sistem sanitasi skala kawasan, serta penguatan regulasi dan pengawasan terhadap penghasil limbah.

#### 4. Keterbatasan dan kerusakan lahan

Pertumbuhan penduduk dan aktivitas pembangunan infrastruktur telah mendorong alih fungsi lahan yang cukup masif, dari kawasan lindung dan resapan air menjadi kawasan terbangun. Hal ini menyebabkan Hal ini mengakibatkan penurunan kapasitas ekosistem dalam menyediakan jasa lingkungan seperti penyerapan air hujan, penyeimbang iklim mikro, dan habitat keanekaragaman hayati. Data dari Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, laju alih fungsi lahan hijau menjadi permukiman dan komersial meningkat rata-rata 3–5% per tahun.

Kota Balikpapan menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan lahan, terutama terkait keterbatasan daya dukung lahan dan meningkatnya tingkat kerusakan akibat aktivitas antropogenik. Dengan luas wilayah yang relatif terbatas dan topografi yang bervariasi, tekanan terhadap pemanfaatan ruang di Kota Balikpapan semakin tinggi, terutama di kawasan pesisir dan perbukitan yang rawan longsor serta kawasan tangkapan air.

#### **b) Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2025-2043**

Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2025-2043 menjadi dasar pentingnya dalam mengidentifikasi isu-isu strategis lingkungan yang berpotensi mempengaruhi arah pembangunan wilayah. Isu-isu strategis



yang telah dikaji dalam KLHS Revisi RTRW perlu menjadi perhatian antar lintas sektor, karena Isu-isu strategis yang telah dikaji dalam dokumen KLHS RTRW ini bisa mencerminkan tantangan utama dalam pengelolaan ruang dan lingkungan, mulai dari tekanan terhadap kawasan lindung, alih fungsi lahan, penurunan kualitas lingkungan, hingga risiko terhadap daya dukung dan daya tampung wilayah. Oleh karena itu, pemahaman atas isu strategis dari hasil KLHS menjadi landasan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam merumuskan kebijakan, program, dan sasaran prioritas yang responsif dan adaptif terhadap dinamika lingkungan hidup Kota Balikpapan ke depan.

Dalam dokumen KLHS Revisi RTRW Kota Balikpapan Tahun 2025-2043 terdapat 9 point isu pembangunan berkelanjutan paling strategis, 9 isu tersebut mengenai Kualitas air, pencemaran dan degradasi lingkungan pesisir, alih fungsi lahan, migrasi dan pengelolaan transportasi. Terdapat 4 isu yang isu yang berkaitan langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup yaitu:

1. Keterbatasan sumber dan penurunan kualitas air bersih

Berdasarkan dokumen Rencana Induk Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kota Balikpapan total penyediaan air baku Kota Balikpapan pada tahun 2020 adalah sebesar 1.570 liter/detik dari total kebutuhan sebesar 2.248 liter/detik sehingga masih terdapat kekurangan air baku sebesar 678 liter/detik. Selain itu, pencemaran air di Kota Balikpapan disebabkan oleh air limbah domestik dan non domestik. KLHS RTRW Kota Balikpapan mengidentifikasi jika keterbatasan sumber dan penurunan kualitas air ini menjadi salah satu isu strategis paling berdampak, karena air merupakan kebutuhan krusial yang harus dipenuhi demi keberlangsung kegiatan penduduk. Penurunan Sumber dan Kualitas air bersih sangat berkaitan erat dengan Daya Dukung Daya Tampung, Kinerja Layanan Jasa Lingkungan, Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan Hidup.

2. Pengelolaan sampah belum optimal

Tercatat pada tahun 2022 rata-rata timbulan sampah di Kota Balikpapan yang masuk ke dalam TPA Manggar yaitu 374,77 ton/bulan timbulan sampah ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang tercatat sebesar 357,40 ton/bulan. Selain meningkatnya jumlah timbulan sampah permasalahan lain yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah dari sumber, hal ini terindikasi peningkatan rata-rata timbulan sampah perbulan, dan banyak bank sampah yang tidak aktif sehingga minimnya pengelolaan sampah. KLHS RTRW Kota Balikpapan mengidentifikasi jika pengelolaan sampah yang belum optimal merupakan salah satu isu strategis yang perlu diatasi kerana berdampak cukup luas bagi kesehatan lingkungan dan juga kesehatan masyarakat, perlu adanya penganan lintas sektor secara terpadu, guna mengurangi

dampak dan mewujudkan kota yang bersih dan berkelanjutan.

### 3. Alih Fungsi dan Konflik Lahan

Masih masifnya alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan pembangunan berkelanjutan menyebabkan kerusakan lingkungan dan menjadi tantang bagi Kota Balikpapan. Selain itu, adanya Proyek Ibu Kota Negara dan belum optimalnya upaya pengawasan peruntukan lahan turut mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan. Maka perlu langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah alih fungsi lahan dan konflik lahan ini agar bisa melindungi lingkungan serta tetap bisa menunjang penyediaan lahan untuk membangun IKN. Hasil KLHS Revisi RTRW Kota Balikpapan Tahun 2025–2043 mengidentifikasi bahwa alih fungsi lahan dan konflik pemanfaatan ruang menjadi ancaman serius bagi kelestarian lingkungan, perlindungan kawasan resapan air, dan upaya mitigasi bencana. Penanganan isu ini memerlukan penguatan penegakan aturan tata ruang, keterpaduan data spasial, serta peningkatan transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

### 4. Keterancaman Biodiversitas

Kota Balikpapan merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati tinggi di kawasan pesisir Kalimantan. Hal ini ditandai dengan keberadaan berbagai jenis flora dan fauna endemik, serta ekosistem penting seperti hutan mangrove, hutan lindung dan kawasan rawa. Selain itu, Kota Balikpapan juga memiliki Kebun Raya yang memiliki berbagai macam jenis flora. Namun demikian, tekanan terhadap keanekaragaman hayati ini meningkat karena adanya alih fungsi lahan, pencemaran, perluasan kawasan permukiman dan kegiatan industri. KLHS Revisi RTRW Kota Balikpapan mengidentifikasi bahwa keterancaman biodiversitas menjadi salah satu isu strategis utama yang perlu diantisipasi, mengingat peran pentingnya dalam menjaga keseimbangan ekologi dan ketahanan lingkungan jangka panjang. Tanpa pengelolaan ruang yang berwawasan lingkungan, potensi kehilangan spesies dan kerusakan habitat akan terus meningkat, yang pada akhirnya berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat dan daya dukung wilayah.

## **2) Telaah Isu Lingkungan Dinamis Relevan dengan Dinas Lingkungan Hidup**

### **a) Telaahan Isu Global**

Penguatan pemahaman terhadap isu global diperlukan agar perencanaan pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup, dapat disusun secara kontekstual dan responsif terhadap tantangan yang lebih luas. Isu-isu global ini memiliki implikasi langsung maupun tidak

langsung terhadap keberhasilan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam upaya menjaga kualitas lingkungan, mengelola sumber daya alam secara berkeadilan, dan membangun ketahanan ekosistem. Pemahaman terhadap dinamika global menjadi penting agar arah kebijakan daerah tidak lepas dari tren dan risiko yang tengah berlangsung secara global. Beberapa isu global berikut ini berkaitan erat dengan berbagai tantangan lingkungan hidup sebagai berikut.

1. Urbanisasi Dunia yang Meningkat

Laju urbanisasi global mendorong terbentuknya kawasan-kawasan metropolitan yang sangat padat, dengan konsekuensi meningkatnya kebutuhan akan perumahan, infrastruktur, serta layanan dasar. Di sisi lain, hal ini memperbesar tekanan terhadap ruang terbuka, sistem drainase alami, dan daya dukung lingkungan secara umum. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan fisik wilayah dengan kapasitas lingkungan menimbulkan berbagai persoalan seperti penurunan kualitas udara, peningkatan limbah domestik, dan berkurangnya area resapan air. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan dalam pengendalian pencemaran dan penyediaan ruang ekologis masih menjadi persoalan yang belum tertangani secara optimal di banyak daerah.

2. *Triple Planetary Crisis*: Perubahan Iklim, Polusi, dan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Dunia tengah menghadapi tiga krisis lingkungan utama yang saling terkait. Perubahan iklim berdampak pada cuaca ekstrem, kekeringan, dan kenaikan muka air laut; polusi berdampak langsung terhadap kesehatan manusia dan keberlanjutan lingkungan; sementara hilangnya keanekaragaman hayati memperlemah ketahanan ekosistem secara keseluruhan. Ketiga krisis ini tidak hanya terjadi di tingkat global, tetapi sudah dirasakan pada skala lokal. Penanganan yang belum menyeluruh dan terintegrasi menyebabkan persoalan pencemaran udara, air, dan lahan masih terus terjadi, serta lemahnya upaya perlindungan terhadap habitat alami dan spesies endemik yang rentan pun terus menjadi perhatian.

3. Persaingan dan Degradasi Sumber Daya Alam

Kebutuhan global yang semakin besar terhadap air, tanah, dan bahan tambang memperbesar risiko eksploitasi berlebihan di banyak wilayah, termasuk di tingkat daerah. Persaingan pemanfaatan ruang antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan jangka panjang. Di sisi lain, keterbatasan ruang terbuka hijau, terutama di wilayah perkotaan, memperburuk kualitas lingkungan dan menurunkan fungsi ekosistem alami. Belum optimalnya perencanaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau menjadi indikasi bahwa keseimbangan antara pembangunan dan

konservasi sumber daya masih memerlukan penguatan dalam pelaksanaannya.

#### 4. Perubahan Demografi Global

Pergeseran jumlah dan komposisi penduduk secara global, seperti urbanisasi, pertumbuhan penduduk usia produktif, hingga peningkatan angka harapan hidup. Hal tersebut membawa dampak terhadap tekanan terhadap sumber daya alam dan perubahan pola konsumsi. Pertambahan populasi di perkotaan mendorong peningkatan permintaan lahan, air bersih, dan energi, serta menghasilkan limbah dalam jumlah besar. Dalam konteks ini, pengelolaan keanekaragaman hayati kerap kali terpinggirkan oleh kebutuhan pemanfaatan ruang yang bersifat jangka pendek. Pengelolaan yang belum optimal terhadap keanekaragaman hayati, baik di kawasan lindung maupun di luar kawasan konservasi, menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan ekologis.

#### 5. Tata Kelola Global dan Kebutuhan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan

Globalisasi dan kompleksitas isu lingkungan menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang responsif, inklusif, dan berbasis data. Harmonisasi antara kebijakan global, nasional, dan daerah menjadi hal yang krusial dalam menjawab tantangan lintas batas seperti perubahan iklim, perdagangan karbon, atau transisi energi bersih. Namun, pada praktiknya, di tingkat lokal masih dijumpai kelemahan dalam integrasi kebijakan sektoral, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta lemahnya koordinasi lintas perangkat daerah. Hal ini berdampak pada belum optimalnya penanganan berbagai isu pencemaran, baik udara, air, maupun lahan, yang memerlukan pendekatan lintas sektor dan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan akuntabel.

### b) Telaahan Isu Nasional

Telaahan isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan bersifat nasional berkaitan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, serta isu pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

#### (1) Telaahan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran arah pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2025 hingga tahun 2045. Visi pembangunan nasional tahun 2025-2045 berdasarkan RPJP

adalah **Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur**. Visi Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur dalam RPJPN 2025-2045 menggambarkan cita-cita untuk menciptakan pembangunan yang kompetitif serta produktivitas yang inklusif dan berkelanjutan melalui transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Visi ini menjadi pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan untuk mencapai tujuan jangka panjang ini, yang diharapkan tercapai pada tahun 2045.

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui **8 (delapan) misi dan agenda pembangunan nasional** sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas.
3. **Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.**
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia.
5. **Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi.**
6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.
7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Berdasarkan arahan misi dan agenda pembangunan, Dinas Lingkungan Hidup berkaitan dengan **Isu Lingkungan Hidup Berkualitas**, yaitu pada **misi pembangunan 5 (lima)**. Hal tersebut termasuk juga berkaitan dengan **Isu Pembangunan Berkelanjutan yang memperhatikan peningkatan kualitas air dan udara serta pengelolaan limbah, pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, serta *biodiversity conservation***. Terdapat beberapa arah kebijakan yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan dokumen RPJPN sebagai berikut.

- a. **Peningkatan pengelolaan limbah B3 dan limbah medis** berkelanjutan yang terintegrasi dari hulu-hilir dengan penekanan pada perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha;
- b. **Peningkatan kualitas air dan udara serta pengelolaan limbah** melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau;
- c. **Pengelolaan lahan** secara berkelanjutan;
- d. **Implementasi pembangunan infrastruktur yang sinergi** dengan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk

implementasi **sistem peringatan dini kualitas air dan udara.**

Renstra perangkat daerah harus disusun dengan mempertimbangkan 8 (delapan) misi dan agenda pembangunan serta isu yang telah ditetapkan dalam RPJPN. Artinya, setiap perangkat daerah harus menyusun rencana strategis yang mendukung pencapaian visi nasional dan memastikan bahwa kebijakan dan program daerah selaras dengan prioritas pembangunan nasional yang diatur dalam RPJPN. Setiap sasaran pokok dalam misi pembangunan jangka panjang ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan yang diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

**(2) Telaahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029**

Isu-isu strategis nasional merupakan urgensi yang harus diperhatikan dalam pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Terdapat 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi Asta Cita dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

1. **Prioritas Nasional 1:** Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).
2. **Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.**
3. **Prioritas Nasional 3:** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan *agromaritim industry* di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. **Prioritas Nasional 4:** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. **Prioritas Nasional 5:** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. **Prioritas Nasional 6:** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. **Prioritas Nasional 7:** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

**8. Prioritas Nasional 8:** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Berdasarkan 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Nasional tersebut, isu lingkungan hidup berkaitan dengan **Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.**

Isu jangka menengah nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup, yaitu Pembangunan Lingkungan Hidup. Berdasarkan hasil capaian pembangunan lingkungan hidup, beberapa isu yang menjadi perhatian ialah berkaitan dengan implementasi kebijakan **pengelolaan sampah, penanganan deforestasi, dan kerusakan ekosistem laut.**

Capaian pembangunan lingkungan hidup juga dinilai berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu wilayah yang mengalami penurunan IKLH dari tahun ke tahun. Maka dari itu, Kota Balikpapan sebagai salah satu bagian dari Provinsi Kalimantan Timur juga perlu memperhatikan kinerja capaian tersebut.

**(3) Telaahan Pembangunan Ibu Kota Nusantara**

Ibu Kota Negara bernama Nusantara (Ibu Kota Nusantara) adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara. Ibu Kota Nusantara meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 Hektare dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 Hektare. Wilayah Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pertumbuhan baru memanfaatkan keunggulan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda sebagai daerah mitra IKN.

Batas wilayah Ibu Kota Nusantara yaitu:

- 1) Bagian Selatan: Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- 2) Bagian Selatan: Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 3) Bagian Utara: Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
- 4) Bagian Timur: Selat Makassar.

Kota Balikpapan sebagai daerah mitra IKN berperan sebagai “Otot” (pusat aktivitas) atau dalam definisi lain **menjadi pusat logistik dan layanan distribusi serta**

**memperkuat peran Superhub Ibu Kota Nusantara dalam arus perdagangan antar dan intra-regional.** Kota Balikpapan juga akan menampung klaster petrokimia dan membantu mendorong diversifikasi produk dari minyak dan gas hulu menjadi berbagai turunan petrokimia hilir.

Maka dari itu, dalam hal ini pengembangan terkait dengan infrastruktur transportasi di sekitar kawasan IKN melibatkan Kota Balikpapan. Hal itu menyebabkan pentingnya persiapan dan regulasi yang berkaitan dengan kualitas air, udara, dan lahan (komponen penilaian IKLH) serta pengelolaan persampahan di Kota Balikpapan akibat penambahan *demand*.

**c) Telaahan Isu Regional**

Telaahan isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dan bersifat regional berkaitan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Balikpapan Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, serta Renstra K/L atau OPD terkait.

**(1) Telaahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045**

Dokumen RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 menetapkan visi, yaitu:

**“Balikpapan Nyaman untuk Semua 2045: Superhub Industri dan Jasa yang Maju dan Berkelanjutan dengan Semangat Madinatul Iman”** dengan 8 (delapan) misi sebagai berikut.

1. **Misi 1:** Mewujudkan transformasi sosial dengan membangun manusia unggul dan berdaya saing global
2. **Misi 2:** Mewujudkan transformasi ekonomi berkelanjutan
3. **Misi 3: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis, inovatif, dan kolaboratif**
4. **Misi 4:** Mewujudkan stabilitas kota dan demokrasi substantial
5. **Misi 5: Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan**
6. **Misi 6:** Mewujudkan pembangunan kota cerdas, terintegrasi dan berkeadilan
7. **Misi 7:** Mewujudkan sarana dan prasarana terpadu, berkualitas dan ramah lingkungan
8. **Misi 8:** Mewujudkan keselarasan dan kesinambungan pembangunan

Terdapat beberapa permasalahan lingkungan hidup yang dijelaskan dalam dokumen RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 salah satunya ialah terkait **Penanganan**



**Degradasi Lingkungan Belum Optimal**, yaitu berkaitan dengan nilai **IKLH yang fluktuatif dari tahun 2015 hingga 2023**. Salah satu penyebab dari kondisi tersebut berkaitan dengan indeks kualitas air yang cenderung belum optimal pada rentang waktu tahun 2015 hingga 2023. Isu lainnya berkaitan dengan pengelolaan persampahan yang sempat mengalami penurunan pada tahun 2018 dan belum mencapai target yang diinginkan pada tahun 2020. Hal tersebut disebabkan oleh **ketersediaan pusat daur ulang sampah yang masih minim** di Kota Balikpapan. **Pengelolaan sampah secara mandiri** juga menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mencapai target tersebut. Selain permasalahan lingkungan hidup, terdapat pula permasalahan tata kelola pemerintahan yang memang berkaitan dengan seluruh dinas-dinas terkait.

Isu strategis jangka Panjang Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 dirumuskan ke dalam 7 (tujuh) poin sebagai berikut.

- 1. Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan**
2. Penguatan SDM Berdaya Saing dan Perlindungan Sosial
- 3. Reformasi Birokrasi Berdampak dan Tata Kelola Kolaboratif**
- 4. Pengendalian, Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Bencana**
5. Kualitas Infrastruktur (yang Terpadu) dan Penataan Utilitas
6. Peningkatan Kota Cerdas dan Nyaman Huni
7. Maju sebagai Mitra IKN

Berdasarkan daftar isu strategis jangka panjang tersebut, dinas lingkungan hidup berkaitan dengan **Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan (membahas terkait IKLH), Pengendalian, Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Bencana (membahas terkait ekosistem berkelanjutan)** serta **Reformasi Birokrasi Berdampak dan Tata Kelola Kolaboratif (terkait urusan tata kelola pemerintahan)**.

**(2) Telaahan Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Balikpapan Terpilih Tahun 2025-2029**

Menekankan pada berbagai program strategis untuk menghadapi tantangan yang dihadapi Indonesia dengan visi sebagai berikut:

**“Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua dalam Bingkai Madinatul Iman”**

Berikut beberapa poin utama dari misi dari wali kota dan wakil wali kota Kota Balikpapan Tahun 2025-2029:

1. Membangun dan Mengembangkan Pemerintah yang Bersih dan Profesional yang Berorientasi Pada Pelayanan Masyarakat

2. Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur yang Bisa Memenuhi Seluruh Kebutuhan Masyarakat Balikpapan
3. Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan Terdidik
4. Mengembangkan Perekonomian yang Tumbuh Berkeadilan untuk Semua
5. **Konsisten Menjaga Lingkungan Hidup yang Sehat dan Nyaman untuk Semua**

Visi dan misi tersebut dijabarkan kembali melalui dokumen rencana pembangunan Kota Balikpapan pada periode tahun 2025-2029.

### (3) **Telaahan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

Sesuai dengan Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 menetapkan visi, yaitu "**Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman**". Visi tersebut berdasarkan oleh visi yang dirumuskan kepala daerah terpilih. Visi tersebut mencerminkan Kota Balikpapan yang nyaman dihuni dengan spiritualitas yang mendampingi setiap aktivitas penduduk kota serta memiliki peradaban yang tinggi.

Misi dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD juga disesuaikan dengan misi dari kepala daerah terpilih. Misi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup, yaitu pada **Misi 5: Konsisten Menjaga Lingkungan Hidup yang Sehat dan Nyaman untuk Semua** berkaitan dengan isu strategis pengendalian, pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Berikut merupakan arah kebijakan yang berkaitan.

1. Peningkatan pengelolaan sampah kolaboratif berbasis hulu-hilir.
2. Pengembangan ekonomi hijau dalam rangka membangun ketangguhan terhadap perubahan iklim.
3. Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem dilaksanakan melalui penguatan kerja sama antardaerah yang berada dalam satu kesatuan ekologi/ekosistem.

Isu strategis berdasarkan dokumen Rancangan Awal RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan lingkungan hidup, yaitu **Pengendalian, Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Bencana serta Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif**. Isu Pengendalian, Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Bencana memiliki fokus pada peningkatan pencemaran dan limbah,

degradasi lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, serta pengelolaan sampah kolaboratif berbasis hulu ke hilir.

**(4) Telaahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2024–2043**

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan sebagai peruntukan ruang dilakukan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen tersebut mendukung fungsi Kota Balikpapan sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional, khususnya di wilayah Indonesia Bagian Tengah. Perwujudan Kota Balikpapan sebagai kota jasa yang dinamis dan selaras disesuaikan dengan daya dukung lingkungan dan tetap mempertahankan kawasan hutan lindung sebagai penyumbang paru-paru dunia.

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2024–2043 sebagai dokumen perencanaan yang dipedomani untuk penyusunan perencanaan jangka menengah maupun perencanaan strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Balikpapan. Dalam RTRW Kota Balikpapan rencana penyediaan pola ruang terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya yang semuanya berkait erat dengan tugas dan fungsi DLH sebagai Perangkat Daerah penyelenggara urusan lingkungan hidup.

Dokumen **Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2024–2043** menjadi dasar penetapan arah pembangunan wilayah, termasuk pengendalian dampak lingkungan. Telaah ini mengidentifikasi **3 (tiga) Strategi Penataan Ruang (Pasal 6-8)** yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut.

1. Strategi Peningkatan Pelayanan Sistem Jaringan Prasarana yang Merata dan Ramah Lingkungan, Terpadu dan Modern:
  - (a) Mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu
2. Strategi Peningkatan RTH yang Proporsional di Seluruh Wilayah Daerah:
  - (a) Menyediakan RTH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Daerah;
  - (b) Mengembangkan RTH di Kawasan Sempadan; dan
  - (c) Mengembangkan RTH di Kawasan Penyangga Hutan Lindung
3. Strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan
  - (a) Mempertahankan fungsi lindung di Kawasan Hutan Lindung;
  - (b) Melestarikan kawasan pesisir, sumber daya air dan fungsi perlindungan keanekaragaman hayati; dan

- (c) Mengembangkan kawasan konservasi dalam menjaga kelestarian alam, ketersediaan sumber daya air dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Adapun dalam Indikasi Program Utama yang tercantum pada RTRW Kota Balikpapan Tahun 2024-2043 dapat diketahui program tata ruang yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel II. 9**  
**Hasil Telaah Indikasi Program Utama (IPU) Dokumen RTRW Kota Balikpapan Tahun 2024-2043**

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
A.	Perwujudan Rencana Struktur Ruang													
	Perwujudan Sistem Pusat Pelayanan													
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya													
	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam rangka pemenuhan fungsi PPK	PPK Karang Joang di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara	APBN APBD Provinsi APBD Kota Sumber lain yang sah	Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang Lingkungan Hidup Bidang Penataan Ruang										
	Program Pengelolaan Persampahan													
	Pengembangan infrastruktur persampahan dalam rangka pemenuhan fungsi PPK	PPK Karang Joang di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara	APBN Sumber lain yang sah	Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang Kebersihan / Bidang Lingkungan Hidup										
	Peningkatan Pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur persampahan	PPK Klandasan terletak di Kelurahan Klandasan Ilir	APBN Sumber lain yang sah	Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang Kebersihan / Bidang Lingkungan Hidup										
	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota													

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
	Pembangunan SPPK	SPPK Kariangau di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota Sumber lain yang sah	Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang Pekerjaan Umum Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kesehatan/ Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif/ Bidang Perumahan dan Permukiman Bidang Lingkungan Hidup									
	Penyediaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Skala Kecamatan	1. SPPK Muara Rapak di Kelurahan Muararapak, Utara 2. SPPK Balikpapan	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota Sumber lain yang sah	Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang Pekerjaan Umum Bidang Pendidikan dan									

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
		Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan 3. SPPK Manggar Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan 4 . SPPK Graha Indah k m. 8 di Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara		Kebudayaan Bidang Kesehatan/ Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif/ Bidang Perumahan dan Permukiman Bidang Lingkungan Hidup									
	Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Skala Kecamatan	SPPK Kariangau di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota Sumber lain yang sah	Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang Pekerjaan Umum Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kesehatan/ Bidang Pendidikan dan									

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
				Kebudayaan Bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif/ Bidang Perumahan dan Permukiman Bidang Lingkungan Hidup									
<b>Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan</b>													
	Pembangunan Pusat Pelayanan Lingkungan	PPL Kariangau I di Kelurahan Kariangan Kecamatan Balikpapan Barat PPL Kariangau II di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat PPL Kariangau Kota Baru di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota Sumber lain yang sah	Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang Pekerjaan Umum Bidang Perhubungan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kesehatan/ Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif/									



No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
				Bidang Permukiman/ Bidang Lingkungan Hidup									
	Pengembangan sumber air hujan (PAH)	Kota Balikpapan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota  Bidang Lingkungan Hidup Bidang SDA									
<b>Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah B3</b>													
<b>Program Pengendalian B3 dan Limbah B3</b>													
	Pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (B3) Manggar di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota  Bidang Lingkungan									
	Pengembangan dan Pemeliharaan fasilitas pengelolaan limbah B3	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota  Bidang Lingkungan									

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
		beracun (B3) Manggar di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur											
<b>Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan</b>													
<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>													
<b>Pengelolaan Sampah</b>													
	Penyusunan Masterplan Persampahan	Kota Balikpapan	APBD Kota	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota  Bidang Kebersihan Bidang Lingkungan Hidup									
<b>Perwujudan TPS</b>													
<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>													
<b>Pengelolaan Sampah</b>													
	Pengembangan dan Peningkatan TPS	TPS tersebar diseluruh Kecamatan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota  Bidang Kebersihan Bidang Lingkungan Hidup Bidang Pekerjaan Umum									
	Pembangunan TPS	TPS tersebar diseluruh Kecamatan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota									

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
				Bidang Kebersihan Bidang Lingkungan Hidup Bidang Pekerjaan Umum									
<b>Perwujudan TPS3R</b>													
<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>													
<b>Pengelolaan Sampah</b>													
	<b>Pengembangan TPS3R</b>	TPS tersebar diseluruh Kecamatan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota  Bidang Kebersihan Bidang Lingkungan Hidup Bidang Pekerjaan Umum									
<b>Perwujudan TPA</b>													
<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>													
<b>Pengelolaan Sampah</b>													
	Pengembangan dan peningkatan kualitas TPA	TPAS Manggar di Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota  Bidang Kebersihan Bidang Lingkungan Hidup Bidang Pekerjaan Umum									
<b>Perwujudan TPST</b>													
<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>													

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
	Pengelolaan Sampah													
	Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas TPST	TPST Karang Joang TPST Pasar Pandansari TPST Pasar Klandasan TPST Pasar Sepinggan TPST Baru Ilir TPST Jl Pandan Arum Kelurahan Marga Sari TPST Sido Mulyo Kelurahan Margo Muyo	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota  Bidang Kebersihan Bidang Lingkungan Hidup Bidang Pekerjaan Umum										
	Pemeliharaan dan Peningkatan kualitas TPST berupa Intermediate Treatment Facility (ITF)	TPST Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota  Bidang Kebersihan Bidang Lingkungan Hidup Bidang Pekerjaan Umum										
	Pemeliharaan dan Peningkatan kualitas TPST berupa Material Recovery Facility (MRF)	TPST Gunung Bahagia	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota  Bidang Kebersihan Bidang Lingkungan Hidup										

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
				Bidang Pekerjaan Umum									
	Pembangunan TPST	TPST Perumahan Balikpapan Permai TPST Perumahan Balikpapan Baru TPST Perumahan WIKA TPST Perumahan Grand City TPST Graha Indah TPST Skala Kecamatan di setiap Kecamatan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota  Bidang Kebersihan Bidang Lingkungan Hidup Bidang Pekerjaan Umum									
	Pemeliharaan TPST	TPST Perumahan Balikpapan Permai TPST Perumahan Balikpapan Baru TPST Perumahan WIKA TPST Perumahan Grand City TPST Graha Indah TPST Skala Kecamatan di setiap Kecamatan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota  Bidang Kebersihan Bidang Lingkungan Hidup Bidang Pekerjaan Umum									
<b>B.</b>	<b>Perwujudan Rencana Pola Ruang</b>												
	<b>Perwujudan Kawasan Lindung</b>												
	<b>Perwujudan Badan Air dengan kode BA</b>												

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
	Program Pengelolaan SDA													
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada WS dalam 1 Daerah Kota													
	Pencegahan dan penanggulangan pencemaran air	Tersebar di seluruh kecamatan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pekerjaan Umum Bidang Lingkungan Hidup										
	Operasional dan Pemeliharaan Daerah Tangkapan Air	Tersebar di seluruh kecamatan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pekerjaan Umum Bidang Lingkungan Hidup										
	Revitalisasi dan Normalisasi Badan Air	Tersebar di seluruh kecamatan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Daerah Kabupaten/Kota Bidang SDA Bidang Lingkungan Hidup										
	Pengendalian Pemanfaatan Badan Air	Tersebar di seluruh kecamatan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Daerah Kabupaten/Kota Bidang SDA Bidang Lingkungan Hidup										
1.2	Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahnya dengan Kode PTB													

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
1.2.1	Perwujudan Kawasan Hutan Lindung dengan Kode HL													
a	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)													
a.1	Pengelolaan Kebun Raya													
1)	Peningkatan dan Pemeliharaan Kebun Raya	Kecamatan Balikpapan Utara	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup										
b	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata													
b.1	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi													
1)	Peningkatan dan Pemeliharaan Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup	Kecamatan Balikpapan Utara	APBN / APBD Provinsi / Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan										
1.3	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat dengan Kode PS													
a	Program Pengelolaan Sumber Daya Air													
a.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada WS Daerah Kota													
2)	Pemeliharaan dan pengembangan jalur hijau di sepanjang sempadan sungai	Tersebar di Seluruh Kecamatan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Dinas Lingkungan Hidup										
3)	Rehabilitasi kawasan sempadan sungai	Tersebar di Seluruh Kecamatan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Dinas Lingkungan Hidup										
4)	Perlindungan dan pengembangan sempadan pantai	Tersebar di Seluruh Kecamatan	APBN / APBD Provinsi / Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup										
5)	Pemeliharaan dan pengembangan jalur	Tersebar di Seluruh Kecamatan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup										

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
	hijau di sekitar kawasan danau/waduk												
6)	Penyediaan dan pemeliharaan RTH di kawasan perlindungan setempat sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Tersebar di Seluruh Kecamatan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup									
1.4	<b>Perwujudan Kawasan Ruang Terbuka Hijau</b>												
a	<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</b>												
a.1	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>												
1)	Penyusunan kajian/ <i>master plan</i> RTH	Kota Balikpapan	APBD Kota	Bidang Perencanaan Pembangunan, Bidang Lingkungan Hidup									
2)	Pengadaan tanah dalam rangka penyediaan RTH Publik	Kota Balikpapan	APBD Kota	Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Pertanahan, Bidang Aset Daerah									
1.4.1	<b>Perwujudan Rimba Kota dengan Kode RTH-1</b>												
a	<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</b>												
a.1	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>												
1)	Kajian inventarisasi dan penetapan rimba kota	Tersebar seluruh kecamatan	APBD Kota	Bidang Lingkungan Hidup									
2)	Pengadaan tanah untuk Kawasan Rimba Kota	Tersebar seluruh kecamatan	APBD Kota	Bidang Pertanahan, Bidang Penataan Ruang, Bidang Lingkungan Hidup									
1.4.2	<b>Perwujudan Taman Kota dengan kode RTH-2</b>												



No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
a	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati													
a.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota													
1)	Pembangunan, Pengembangan, Peningkatan, dan Pemeliharaan taman kota	Tersebar di Seluruh Kecamatan	APBD Kota / Sumber lain yang Sah	Bidang Tata Ruang, Bidang Lingkungan Hidup										
1.4.3	Perwujudan Taman Kecamatan dengan kode RTH-3													
a	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati													
a.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota													
2)	Penetapan dan pembangunan taman kecamatan	Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Selatan	APBD Kota/ Sumber lain yang Sah	Bidang Lingkungan Hidup										
1.4.4	Perwujudan Taman Kelurahan dengan kode RTH-4													
a	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati													
a.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota													
1)	Pembangunan Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan taman kelurahan	Tersebar di seluruh kecamatan	APDB / Kota Sumber lain yang Sah	Bidang Tata Ruang, Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Perumahan dan Permukiman										
1.5.5	Perwujudan Taman RT dengan Kode RTH-6													
a	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati													
a.1	Pengelolaan Keankeragaman Hayati Kabupaten/Kota													
1)	Penyerahan PSU berupa RTH Perumahan	Tersebar di seluruh Kecamatan	APDB / Kota Sumber lain yang Sah	Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Aset, Bidang Lingkungan Hidup										

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
2)	Pembangunan Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan Taman RT	Tersebar di seluruh Kecamatan	APDB / Kota Sumber lain yang Sah	Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Aset, Bidang Lingkungan Hidup									
1.5.7	<b>Perwujudan Jalur Hijau dengan Kode RTH-8</b>												
a	<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</b>												
a.1	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>												
1)	Pembangunan, Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalur Hijau	Tersebar di seluruh Kecamatan	APDB / Kota Sumber lain yang Sah	Bidang Tata Ruang, Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Pekerjaan Umum									
1.6	<b>Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM</b>												
a	<b>Program Pengelolaan Hutan</b>												
a.1	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>												
1)	Pemeliharaan kawasan ekosistem mangrove	Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Timur	APBN / APDB / Provinsi Sumber lain yang Sah	Bidang Liingkungan Hidup									
2)	Rehabilitasi kawasan ekosistem mangrove	Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan	APBN / APDB / Provinsi Sumber lain yang Sah	Bidang Liingkungan Hidup									

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
		Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Timur											
3)	Penyediaan dan Pemeliharaan RTH di Kawasan Ekosistem Mangrove sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Timur	APBN / APBD / Provinsi Sumber lain yang Sah	Bidang Lingkungan Hidup									
1.7	<b>Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI</b>												
a	<b>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>												
a.1	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kota</b>												
1)	Pengembangan SPAL industri	Kota Balikpapan	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota/Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup									
2)	Penyediaan dan Pemeliharaan RTH di Kawasan Peruntukan Industri sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Tersebar di seluruh kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota/Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup									
1.8	<b>Perwujudan Kawasan Permukiman dengan Kode PM</b>												
a.1	<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</b>												
1	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>												

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
1)	Penyerahan PSU berupa RTH perumahan sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan INBI	Tersebar di seluruh kecamatan	APBD Kota/Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup									
1.9	<b>Perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan kode K</b>												
a	<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>												
a.1	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>												
1)	Penyediaan dan Pemeliharaan di Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI												
1.10	<b>Perwujudan Kawasan Perkantoran dengan Kode KT</b>												
a	<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>												
a.1	<b>Penyelenggaraan Banguna Gedung di wilayah Daerah Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik Fungsi Banguna Gedung</b>												
1)	Penyediaan dan Pemeliharaan RTH di Kawasan Perkantoran sebagai upaya pemenuhan RTH Berdasarkan IHBI												
C	<b>PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KOTA</b>												
1	<b>Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi</b>												
1.1	<b>Perwujudan Kawasan Kota Baru Karang-Joang</b>												
a	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>												
a.1	<b>Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya</b>												

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
1)	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Kawasan Kota Baru Karang Joang di Kecamatan Balikpapan Utara	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota/Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup									
1.2	<b>Perwujudan Kawasan Industri Kariangau</b>												
a	<b>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>												
1)	Pemeliharaan dan rehabilitasi ekosistem mangrove	Kawasan Industri Kariangau di Kecamatan Balikpapan Barat	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota/Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup									
1.3	<b>Perwujudan Kota Baru Teritip</b>												
a	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>												
1)	Pembangunan infrastruktur persampahan	Kawasan Pendidikan di Kecaatan Balikpapan Utara	APBN/Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup									
b	<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>												
1)	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Kawasan Kota Baru Teritip di Kecamatan Balikpapan Timur	APBN/Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup									
2	<b>Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Pandang Kepentingan Sosial Budaya</b>												
2.1	<b>Pewujudan Kawasan Permukiman Atas Air Margosari</b>												
a	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>												
1)	Pembangunan infrastruktur persampahan	Kawasan Pendidikan di Kecaatan Balikpapan Utara	APBN/Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup									
3	<b>Pewujudan Kawasan Strategis dari Sudut Pandang Kepentingan Daya Dukung Lingkungan Hidup</b>												

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
3.1	Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove Sumber													
a	Program Pengelolaan Hutan													
1)	Pemeliharaan ekosistem mangrove	Kawasan ekosistem mangrove sumber di Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara	APBN/APD Provinsi/APBD Kota/Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup										
2)	Rehabilitasi ekosistem mangrove	Kawasan ekosistem mangrove Sumber di Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara	APBN/APD Provinsi/APBD Kota/Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup										
3)	Pengembangan ekowisata	Kawasan ekosistem mangrove Sumber di Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara	APBD Kota/Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup										
3.2	Perwujudan Kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar													
a	Program Pengelolaan Hutan													
1)	Pengembangan Kawasan Penyangga di sekitar Kawasan utan Lindung untuk mencegah ahli fungsi lahan di Kawasan Hutan Lindung	Kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar di Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Timur	APBN/APD Provinsi/APBD Kota/Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup										

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
b	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)													
b.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)													
1)	Kajian inventarisasi dan penetapan rimba kota sebagai kawasan penyangga hutan lindung	Kawasan penyangga hutan indung sunagi wain dan hutan lindung Manggar	APBD Kota	Bidang Lingkungan Hidup										
3.3	Perwujudan Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain													
a	Program Pengelolaan Hutan													
	Pengembangan Kawasan Penyangga di sekitar Kawasan Hutan Lindung untuk mencegah ahli fungsi lahan di kawasan Hutan Lindung	Kawasan Hutan Lindung sungai Wain di Kecaatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota?Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup										
b	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)													
b.1	Pengelolaan Kebun Raya													
1)	Peningkatan dan Pemeliharaan Kebun raya	Kebun Raya Balikpapan di Hutan Lindung di Sungai Wain di Kecamatan Balikpapan Utara	APBN/APBD Kota?Sumber lain yang sah	Bldang Lingkungan Hidup										
b.2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau													
1)	Kajian inventarisasi dan penetapan rima kota sebagai Kawasan	Kawasan Penyangga hutan lindung Sungai Wain di Kecamatan	APBD Kota	Bidang Lingkungan Hidup										

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
	Penyangga Hutan Lindung	Balikpapan Barat dan Balikpapan Utara											

Sumber: Dokumen RTRW Kota Balikpapan Tahun 2024-2043



Berdasarkan **Tabel II.10** dapat disimpulkan Indikasi Program Utama (IPU) yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut.

A. Indikasi Program Struktur Ruang;

1. Perwujudan Sistem Pusat Pelayanan
  - a. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam rangka pemenuhan fungsi PPK
  - b. Pengembangan infrastruktur persampahan dalam rangka pemenuhan fungsi PPK
  - c. Peningkatan Pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur persampahan
  - d. Pembangunan SPPK
  - e. Penyediaan dan Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Skala Kecamatan
2. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan
  - a. Pembangunan PPL
  - b. Perwujudan Bak Penampungan Air Hujan
3. Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah B3
4. Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan
  - a. Penyusunan Masterplan persampahan
5. Perwujudan TPS; TPS3R; TPA; TPST

B. Indikasi Program Pola Ruang;

1. Perwujudan Kawasan Lindung
  - a. Perwujudan Badan Air
  - b. Perwujudan Kawasan Hutan Lindung
  - c. Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat
  - d. Perwujudan Kawasan Ruang Terbuka Hijau
  - e. Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove
2. Perwujudan Kawasan Budidaya
  - a. Perwujudan Kawasan Peruntukkan Industri
  - b. Perwujudan Kawasan Peruntukkan Permukiman
  - c. Perwujudan Kawasan Peruntukkan Perdagangan dan Jasa
  - d. Perwujudan Kawasan Perkantoran
3. Perwujudan Kawasan Strategis Kota
  - a. Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi
  - b. Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya
  - c. Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Berikut merupakan tabel kaitan antara IPU dari Dokumen RTRW Kota Balikpapan Tahun 2024-2043 dengan program Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

**Tabel II.10**  
**Keterkaitan Program dalam Indikasi Program Utama (IPU) RTRW Kota Balikpapan Tahun 2024-2043 dengan Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.**

Indikasi Program Utama (IPU) Dokumen RTRW Kota Balikpapan Tahun 2024-2043 yang Berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	Program Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berdasarkan Draft Rencana Strategis DLH Kota Balikpapan Tahun 2025-2029
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (Pembangunan SPPK, Pembangunan Pusat Pelayanan Lingkungan, Perwujudan Bak Penampungan Air Hujan)	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
Program Pengendalian B3 dan Limbah B3	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>
Program Pengelolaan Persampahan (Jaringan Persampahan, Perwujudan TPS3R, TPA, dan TPST)	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) (RTH-1, RTH-2, RTH-3, RTH-4, RTH-6, dan RTH-8)	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
Program Pengelolaan Hutan	
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
Program Penataan Bangunan Gedung	

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2024–2043

Berdasarkan tabel tersebut terdapat 3 (tiga) program yang selaras dengan IPU RTRW Kota Balikpapan Tahun 2024-2043, yaitu **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3); PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN; DAN GRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI).**

**3) Penentuan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029**

Isu strategis merupakan kondisi atau tantangan utama yang perlu menjadi perhatian prioritas dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah. Isu ini bersifat penting, mendasar, dan berdampak luas terhadap pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam upaya mewujudkan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Dalam rangka mengidentifikasi isu strategis yang relevan dan kontekstual, dilakukan analisis yang bersumber dari berbagai

masuk dan kajian, antara lain: hasil jaring aspirasi, telaah terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan RTRW Kota Balikpapan, penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta pengamatan atas isu-isu dinamis berskala global, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan daerah.

Dari hasil telaahan tersebut, diperoleh sejumlah faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup, baik dari sisi kelembagaan, kebijakan, kapasitas pengelolaan, hingga dukungan lintas sektor. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar dalam merumuskan isu-isu strategis yang harus ditangani secara sistematis dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Penanganan yang tepat terhadap isu strategis ini diharapkan akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good environmental governance*) dan mendukung tercapainya sasaran-sasaran pembangunan daerah. Berikut merupakan tabel kesimpulan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 berdasarkan hasil telaah.

**Tabel 2.1**  
**Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD		ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD						ISU STATEGIS PD
		GLOBAL	KLHS RTRW	NASIONAL		REGIONAL				
				RPJP Nasional Tahun 2025-2045	RPJM Nasional Tahun 2025-2029	RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045	Rancangan Awal RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029	RTRW Kota Balikpapan Tahun 2024-2043		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)			(7)
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama lintas sektor Penaganan Kualitas Air Permukaan	Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian pencemaran air permukaan	Keterbatasan Ketersediaan dan Kualitas Air Bersih (Telaah KLHS RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2030)	Keterbatasan Sumber dan Penurunan Kualitas Air Bersih (Telaah KLHS RTRW Kota Balikpapan Tahun 2025-2043)	Urbanisasi Dunia yang Meningkat; Triple Planetary Crisis (Perubahan Iklim, Polusi dan Kehilangan Keanekaragaman Hayati)	Peningkatan Kualitas Air dan Udara serta Pengelolaan Limbah (RPJPN Tahun 2025-2045)	IKLH Mengalami Penurunan (RPJMN Tahun 2025-2029)	Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan: Nilai IKLH dalam Kategori Sedang (RPJP Kota Balikpapan Tahun 2025-2045)	Pengendalian, Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Bencana: Pencemaran dan Limbah (Rancangan Awal RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029)	-	Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
Koordinasi dan Sinkronisasi penanganan penurunan kualitas Udara	Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dan upaya mitigasi penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Rendahnya Kualitas Udara Akibat Emisi GRK (Telaah KLHS RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2030)	-							
Koordinasi dan Sinkronisasi penanganan kerusakan lingkungan	Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan	Keterbatasan dan Kerusakan Lahan (Telaah KLHS RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2030)	Alih Fungsi dan Konflik Lahan (Telaah KLHS RTRW Kota Balikpapan Tahun 2025-2043)		Pengelolaan Lahan Berkelanjutan (RPJPN Tahun 2025-2045)					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD		ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD						ISU STRATEGIS PD
		KLHS RPJMD	KLHS RTRW	GLOBAL	NASIONAL		REGIONAL			
					RPJP Nasional Tahun 2025-2045	RPJM Nasional Tahun 2025-2029	RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045	Rancangan Awal RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029	RTRW Kota Balikpapan Tahun 2024-2043	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)			(7)
	Belum optimalnya upaya pemenuhan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)	-	-	Persaingan dan Degradasi Sumber Daya Alam	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Aman dan Inklusif (RPJPN Tahun 2025-2045)	Transformasi Ekonomi Hijau (RPJMN Tahun 2025-2029)	Pengendalian, Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Bencana (RPJP Kota Balikpapan Tahun 2025-2045)	Pengendalian, Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Bencana: Degradasi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati (Rancangan Awal RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029)	Strategi Peningkatan RTH (termasuk Keanekaragaman Hayati) yang Proporsional di Seluruh Wilayah Daerah (RTRW Kota Balikpapan Tahun 2024-2043)	
	Kurangnya sinkronisasi pelaksanaan Analisi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)	-	-		-	-				
	Kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup	-	-		-	-				
Tersedianya kawasan-kawasan potensial untuk konservasi berbasis partisipasi lokal	Belum optimalnya upaya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	-	Keterancaman Biodiversity (Telaah KLHS RTRW Kota Balikpapan Tahun 2025-2043)	Triple Planetary Crisis: Perubahan Iklim, Polusi dan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Tata Kelola Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Conservation) (RPJPN Tahun 2025-2045)	Transformasi Ekonomi Hijau (RPJMN Tahun 2025-2029)				
	Terbatasnya upaya penambahan dan diversifikasi jenis koleksi flora	-	-		-	-				
Tersedianya daya tarik	Kurangnya fasilitas pendukung wisata	-	-			-				

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD		ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD						ISU STATEGIS PD
		KLHS RPJMD	KLHS RTRW	GLOBAL	NASIONAL		REGIONAL			
					RPJP Nasional Tahun 2025-2045	RPJM Nasional Tahun 2025-2029	RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045	Rancangan Awal RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029	RTRW Kota Balikpapan Tahun 2024-2043	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)			(7)
wisata alam yang berpotensi dikembangkan melalui pendekatan ekowisata	untuk mencapai target retribusi daerah									
Adanya potensi peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan penguatan kemitraan	Belum optimalnya penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		-		-	-				
	Terbatasnya pengumpulan data lintas sektor dalam mendukung penyusunan kajian		-		-	-				
	Belum seluruh usaha dan/atau kegiatan kewenangan kota diawasi dikarenakan keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM pengawas di tingkat daerah, baik dari segi jumlah maupun kompetensi teknis dalam pengawasan izin lingkungan		-		-	-				

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD		ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD						ISU STRATEGIS PD
		KLHS RPJMD	KLHS RTRW	GLOBAL	NASIONAL		REGIONAL			
					RPJP Nasional Tahun 2025-2045	RPJM Nasional Tahun 2025-2029	RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045	Rancangan Awal RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029	RTRW Kota Balikpapan Tahun 2024-2043	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)			(7)
Kerjasama lintas sektor untuk peningkatan pengurangan sampah dari hulu	Belum optimalnya upaya penanganan timbunan sampah yang semakin meningkat akibat adanya dinamika pembangunan kota dan pengembangan kawasan strategis nasional di wilayah sekitar	Kurangnya Optimalnya Pengelolaan Sanitasi, Limbah dan Sampah (Telaah KLHS RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2030)	Pengelolaan Sampah Belum Optimal (Telaah KLHS RTRW Kota Balikpapan Tahun 2025-2043)	Perubahan Demografi Global	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir (RPJPN Tahun 2025-2045)	Produksi Sampah Domestik Nasional Diproyeksikan Meningkat (RPJMN Tahun 2025-2029)	Sarana dan Prasarana Terpadu, Berkualitas, dan Ramah Lingkungan (RPJP Kota Balikpapan Tahun 2025-2045)	Pengendalian, Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Bencana: Pengelolaan Sampah Kolaboratif Berbasis Hulu-Hilir (Rancangan Awal RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029)	Strategi Peningkatan Pelayanan Sistem Jaringan Prasarana yang Merata dan Ramah Lingkungan, Terpadu dan Modern (RTRW Kota Balikpapan Tahun 2024-2043)	Belum optimalnya pengelolaan persampahan berkelanjutan
	Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan sampah									
	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan daur ulang sampah akibat belum tersedianya sistem pengelolaan sampah daur ulang yang efektif									
	Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan									

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD		ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD						ISU STRATEGIS PD
		KLHS RPJMD	KLHS RTRW	GLOBAL	NASIONAL		REGIONAL			
					RPJP Nasional Tahun 2025-2045	RPJM Nasional Tahun 2025-2029	RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045	Rancangan Awal RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029	RTRW Kota Balikpapan Tahun 2024-2043	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)			(7)
	Terbatasnya kapasitas pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)									
	Belum optimalnya pengelolaan Limbah B3				Peningkatan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Medis Berkelanjutan (RPJPN Tahun 2025-2045)	-		Pengendalian, Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Bencana: Peningkatan Volume Limbah (Rancangan Awal RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029)		
Terdapat peluang penguatan kolaborasi dan sinergi dalam internal perangkat daerah	Belum terpenuhinya dukungan sistem manajemen pemerintahan daerah yang efektif, terintegrasi, dan berbasis kinerja	-	-	Tata Kelola Global dan Kebutuhan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan	Penguatan Reformasi Birokrasi (RPJPN Tahun 2025-2045)	Transformasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif (RPJMN Tahun 2025-2029)	Reformasi Birokrasi Berdampak dan Tata Kelola Kolaboratif (RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029)	Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif (Rancangan Awal RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029)	-	Belum optimalnya akuntabilitas dan efektivitas kinerja perangkat daerah

Sumber: DLH, 2025



**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**3.1. Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

Visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Balikpapan. Pernyataan visi Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 Kota Balikpapan merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 adalah:

**“Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman”**

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah, maka ditetapkan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3. 1**  
**Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

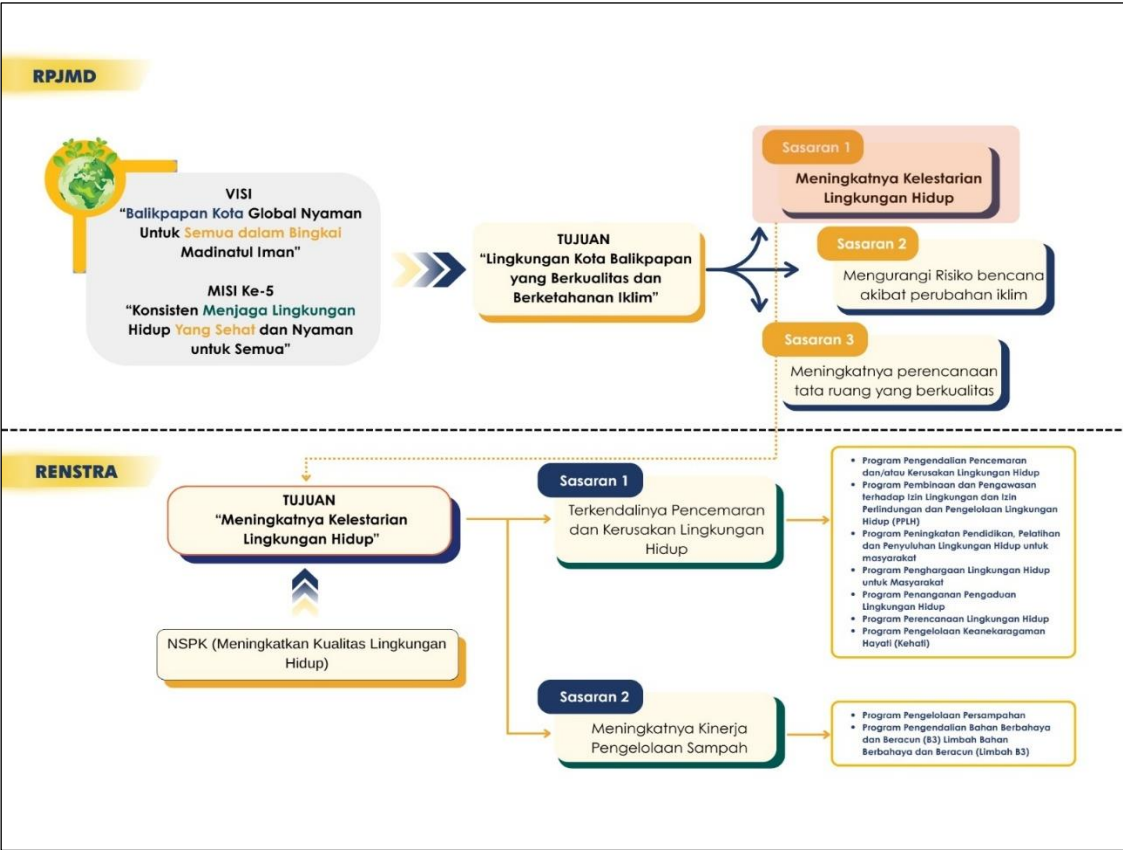
<b>Visi: “Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman”</b>	
<b>Misi Pertama</b>	Membangun dan mengembangkan pemerintahan yang bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan masyarakat;
<b>Misi Kedua</b>	Membangun dan mengembangkan infrastruktur yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat Balikpapan;
<b>Misi Ketiga</b>	Membangun dan mengembangkan kehidupan sosial yang kondusif untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan terdidik;
<b>Misi Keempat</b>	Mengembangkan perekonomian yang tumbuh berkeadilan untuk semua;
<b>Misi Kelima</b>	<b>Konsisten menjaga lingkungan hidup yang sehat dan nyaman untuk semua</b>

Sumber: RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Keterkaitan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029 dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan ada pada Visi Balikpapan kota Global Nyaman untuk Semua dengan isu strategis Pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Sedangkan pada misi yang terkait adalah misi kelima, yaitu:

**“Konsisten Menjaga Lingkungan Hidup yang sehat dan nyaman untuk semua.”**

Tujuan dari misi kelima adalah Lingkungan yang berkualitas dan berketahanan iklim, dengan Indikator Tujuan Penurunan Intensitas Emisi GRK, dengan sasaran meningkatnya kelestarian lingkungan hidup, dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Untuk memudahkan, keterkaitan tersebut dapat dilihat dalam skema berikut:



**Gambar 3.1**  
**Keterkaitan Tugas Fungsi DLH dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah**

Sumber: DLH, 2021

Berdasarkan **Gambar 3.1** dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 yang berkaitan dengan urusan lingkungan hidup berdasarkan dari visi dan misi ke-5 Kepala Daerah mengarah pada tujuan terwujudnya **“Lingkungan Kota Balikpapan yang Berkualitas dan Berketahanan Iklim”**. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan tiga sasaran utama: (1) meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, (2) mengurangi risiko bencana akibat perubahan iklim, dan (3) meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang.

Dalam rangka menyukseskan pembangunan daerah urusan lingkungan hidup dan penyelenggaraan layanan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan menetapkan tujuan strategis dalam Renstra Tahun 2025–2029 berupa **“Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup”**, yang merupakan manifestasi langsung dari sasaran pertama RPJMD. Keterpaduan antara RPJMD dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini menegaskan adanya keterkaitan yang kuat antara dokumen perencanaan tingkat daerah dan perangkat daerah, serta mencerminkan komitmen Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung arah pembangunan Kota Balikpapan menuju kota yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim.

**3.2. Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

Sasaran merupakan pejabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Lembaga dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai. Berdasarkan tujuan rencana strategis yang telah ditetapkan, maka terdapat tiga sasaran dalam mencapai tujuan tersebut sebagai berikut.

**Tabel 3. 2**  
**Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

Tujuan	Sasaran
<b>Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup</b>	Sasaran 1: Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
	Sasaran 2: Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah
	Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: DLH, 2025

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2025-2029 sebagaimana dibawah ini:

**Tabel 3. 3**  
**Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Baseline Tahun 2024	TARGET TAHUN						KET.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>SASARAN RPJMD : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</b>	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah	Indeks	61,51	68,75	68,89	69,04	69,18	69,32	69,47	
		Sasaran 1: Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	54,49	64,40	64,60	64,80	65,00	65,20	65,40	Bobot 26%
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	86,28	83,83	84,03	84,23	84,43	84,63	84,83	Bobot 26%
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	59,20	61,51	61,58	61,65	61,72	61,79	61,86	Bobot 26%
		Sasaran 2: Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	67,60	67,70	67,80	67,90	68,00	68,10	68,20	Bobot 21%
		Sasaran 3: Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,40	76,33	77,23	78,13	79,03	79,93	80,83	

Sumber : DLH, 2025

**3.3. Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029**

Agar tercapainya tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi merupakan upaya sinergis berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusun strategi dan kebijakan sebagai langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun 2025-2029. Adapun strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

- 1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- 2. Pengelolaan persampahan yang berkelanjutan
- 3. Peningkatan akuntabilitas dan efektivitas kinerja perangkat daerah

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan merumuskan tahapan pembangunan lingkungan hidup selama lima tahun secara bertahap dan berkelanjutan. Penahapan ini disusun agar strategi dapat dijalankan secara sistematis, terukur dan adaptif terhadap dinamika pembangunan. Sebagaimana dibawah ini:

**Tabel 3. 4**  
**Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Kota Nyaman untuk semua berbasis Keanekaragaman Hayati melalui Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Olahraga Terpadu	Akselerasi kota nyaman untuk semua berbasis infrastruktur ramah lingkungan berupa Taman Hutan Kota	Peningkatan daya saing menuju kota global melalui Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Peningkatan kota nyaman melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Evaluasi capaian Kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah dalam perwujudan kota global yang nyaman untuk semua

Sumber : DLH, 2025

**3.4. Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rensta Tahun 2025-2029**

Dari arahan startegi, dijabarkan kembali dalam bentuk operasional kebijakan yang terarah, Dinas Lingkungan hidup Kota Balikpapan yang selaras dengan NSPK sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dan arahan kebijaka RPJMD serta strategi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas LignKeyungan Hidup secara bertahap dan terukur:

**Tabel 3. 5**  
**Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup**

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal melalui pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan yang didukung inisiatif lokal	Penguatan pelestarian keanekaragaman hayati melalui Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Olahraga Terpadu dan Taman Hutan Kota	
2		Peningkatan pengelolaan sampah kolaboratif berbasis hulu-hilir	1. Peningkatan Pengelolaan Sampah hilir melalui Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) 2. Peningkatan Pengelolaan Sampah tengah melalui Operasional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3. Peningkatan Pengelolaan Sampah Hulu melalui Optimalisasi Peran Bank Sampah dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	
3		Pengembangan ekonomi hijau dalam rangka membangun ketangguhan terhadap perubahan iklim.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup kota secara bertahap melalui perbaikan kualitas air, udara, dan tutupan lahan	
4		Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem dilaksanakan melalui penguatan kerja sama antardaerah yang berada dalam satu kesatuan ekologi/ekosistem	Penguatan kerjasama antar stakeholder dalam peningkatan Kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah	

Sumber : DLH, 2025

Dari Tabel 3.5 diatas dapat dilihat pendekatan teknis dilakukan untuk kesinambungan dan keterpaduan strategi dari dokumen nasional dan daeah. Arah kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 disusun melalui proses penurunan sistematis dari kebijakan nasiona (NSPK) pada kolom (2), dan juga arahan kebijakan RPJMD Kota Balikpapan pada kolom (3).

Pada NSPK menjadi rujukan adalah **“Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup”**, arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam RPJMD Kota Balikpapan ke dalam delapan bentuk kebijakan yang relevan dengan

isu lingkungan di tingkat kota, meliputi pembangunan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, pelestarian berbasis kearifan lokal, konservasi sumber daya alam, peningkatan pengolahan sampah secara kolaboratif, penanganan banjir dan mitigasi bencana, serta pengembangan ekonomi hijau dan ekosistem berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut serta menyelaraskan dengan arah kebijakan yang ada di atasnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, merumuskan arah kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan ke dalam beberapa kebijakan:

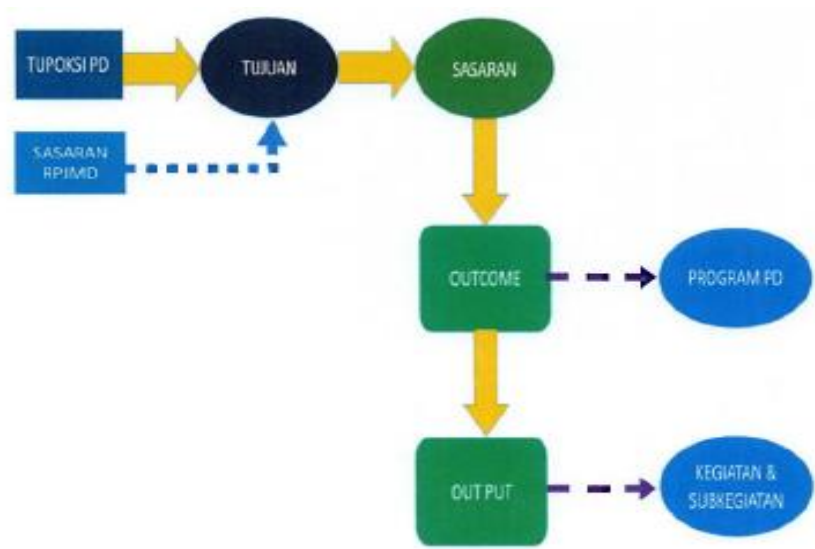
- 1) Penguatan pengendalian dan pencemaran lingkungan hidup
- 2) Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati
- 3) Peningkatan pengelolaan pengaduan lingkungan
- 4) Mengoptimalkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta peningkatan kinerja Bank Sampah
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
- 6) Peningkatan upaya pengendalian limbah cair dan B3
- 7) Peningkatan kualitas lingkungan hidup kota secara bertahap melalui perbaikan kualitas air, udara, dan tutupan lahan
- 8) Mengoptimalkan perencanaan lingkungan hidup
- 9) Meningkatkan kerjasama antar stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup

Kebijakan ini tidak hanya mendukung tujuan dan sasaran RJMD, tetapi juga menjadi penjabaran operasional dari strategi Dinas Lingkungan Hidup yang bersifat teknis dan terukur.

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting, antara lain:

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029;
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra PD melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan Tahun 2024;
3. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/ subkegiatan sampai dengan Tahun 2024 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
4. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
5. Kebijakan nasional;
6. Regulasi yang berlaku; dan
7. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.



**Gambar 4.1**  
**Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra**  
**Dinas Lingkungan Hidup**

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

**4.1. Uraian Program Renstra Dinas Lingkungan Hidup**

Program merupakan perwujudan kebijakan Perangkat Daerah yang dituangkan dalam bentuk rangkaian upaya atau kegiatan, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna mencapai hasil yang terukur dan relevan dengan tugas serta fungsi masing-masing. Program dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Perumusan program harus sejalan dengan visi dan misi daerah, serta disusun



berdasarkan masalah dan isu strategis perangkat daerah. Terdapat 3 (tiga) isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan sebagai berikut.

1. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Pengelolaan Sampah dan Limbah Berkelanjutan
3. Akuntabilitas dan efektivitas kinerja perangkat daerah

Berdasarkan kondisi tersebut tersusunlah 10 (sepuluh) program Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
3. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
5. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
6. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
8. Program Pengelolaan Persampahan;
9. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); dan
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam implementasinya, program wajib berlandaskan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Pelaksanaan program juga harus dievaluasi secara berkala guna menjamin tercapainya target kinerja secara optimal.

#### **4.2. Uraian Kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup**

Kegiatan merupakan kumpulan aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) yang mendukung pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Penyusunan kegiatan dilakukan secara terencana dan sistematis, dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah serta ketersediaan sumber daya. Setiap kegiatan harus dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur guna memudahkan proses pemantauan pencapaian secara efektif.

**Tabel 4.1**  
**Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029**

Program	Kegiatan
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program	Kegiatan
<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	Penyimpanan sementara Limbah B3
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	Pengelolaan Sampah

Sumber: DLH, 2025

Selain itu, kegiatan dirancang agar mampu berkesinambungan dengan program. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk menjamin kualitas, ketepatan sasaran, dan efektivitas pelaksanaannya.

#### 4.3. Uraian SubKegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Subkegiatan merupakan bentuk operasional dari aktivitas dan layanan dalam suatu kegiatan, yang dilaksanakan dalam rangka menjalankan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SubKegiatan Dinas Lingkungan Hidup merupakan turunan dari Kegiatan. Nomenklatur dan indikator dari SubKegiatannya menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri **Nomor 900.1-2850 Tahun 2025** tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

**Tabel 4.2**  
**Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>							
- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah (Indeks)		
		Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup			Indeks Kualitas Air (Indeks)		
					Indeks Kualitas Udara (Indeks)		
					Indeks Kualitas Lahan (Indeks)		
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP		Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen)	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
					Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	
					Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	2.11.02.2.01.0003 - Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	
					Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen)	2.11.02.2.01.0004 - Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terselenggaranya Upaya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	2.11.02.2.02.0004 - Pemantauan dan Evaluasi KLHS	
					Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	
					Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02.0006 - Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		Persentase Parameter yang Memenuhi Baku Mutu (%)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Terlaksananya upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (Laporan)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim (Laporan)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
					Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (Laporan)	2.11.03.2.01.0006 - Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	
					Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
					Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	2.11.03.2.01.0009 - Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	
					Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan)	2.11.03.2.01.0010 - Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim (Laporan)	2.11.03.2.01.0014 - Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	
				Terlaksananya upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
					Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	2.11.03.2.02.0003 - Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
				Terlaksananya upaya pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.03.2.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati		Persentase RTH yang dikelola (%)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
				Terlaksananya pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	2.11.04.2.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
					Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	2.11.04.2.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
					Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan		Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis (%)	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
				Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang melaksanakan izin lingkungan dan izin PPLH	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
					Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	2.11.06.2.01.0007 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	
					Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup		Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
					Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	
					Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota kepada masyarakat	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup		Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%)	2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Terlaksananya penyelesaian pengaduan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)		
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Jumlah Limbah B3 yang Terkelola (Ton)	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Fasilitas Penerbitan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 Sesuai Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3	
					Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	2.11.05.2.01.0005 - Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
				Terlaksananya upaya pengumpulan Limbah B3 dalam satu daerah	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	2.11.05.2.02.0004 - Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	
			Meningkatnya tata kelola persampahan		Persentase Pengelolaan Persampahan (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Terlaksananya pengelolaan sampah melalui penanganan dan pengurangan sampah	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ditangani (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan	
					Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ditangani (Ton)	2.11.11.2.01.0029 - Pelaksanaan Penanganan Sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)	2.11.11.2.01.0030 - Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terwujudnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	2.11.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	2.11.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	
				Terwujudnya profesionalisme aparatur perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.11.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.11.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terwujudnya layanan umum perkantoran perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.11.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.11.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terwujudnya operasional umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.11.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar berfungsi optimal	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
<b>2.11.0.00.0.00.01.0001 - UPTD KEBUN RAYA BALIKPAPAN</b>							
- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati		Persentase RTH yang dikelola (%)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
				Terlaksananya pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01.0003 - Pengelolaan Kebun Raya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>2.11.0.00.0.00.01.0002 - UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH MANGGAR KOTA BALIKPAPAN</b>							
- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah	Meningkatnya tata kelola persampahan		Persentase Pengelolaan Persampahan (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Terlaksananya pengelolaan sampah melalui penanganan dan pengurangan sampah	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	

Sumber : DLH, 2025

**Tabel 4.3**  
**Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				190.094.116.000,00		215.796.939.000,00		396.586.786.000,00		404.518.522.000,00		416.654.078.000,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				28.626.244.849,00		32.305.000.000,00		33.052.000.000,00		33.861.100.000,00		34.876.933.340,00	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	87,07	89,18	28.626.244.849,00	89,39	32.305.000.000,00	89,59	33.052.000.000,00	89,80	33.861.100.000,00	90,00	34.876.933.340,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00	
Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) daerah	1	4	105.000.000,00	4	105.000.000,00	4	105.000.000,00	4	105.000.000,00	4	105.000.000,00	
2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	4	105.000.000,00	4	105.000.000,00	4	105.000.000,00	4	105.000.000,00	4	105.000.000,00	
2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				19.900.000.000,00		21.660.000.000,00		22.100.000.000,00		22.600.000.000,00		23.281.900.340,00	
Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	61	200	19.900.000.000,00	200	21.660.000.000,00	200	22.100.000.000,00	200	22.600.000.000,00	200	23.281.900.340,00	
2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				19.900.000.000,00		21.660.000.000,00		22.100.000.000,00		22.600.000.000,00		23.281.900.340,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	61	200	19.900.000.000,00	200	21.660.000.000,00	200	22.100.000.000,00	200	22.600.000.000,00	200	23.281.900.340,00	
2.11.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				1.650.000.000,00		1.750.000.000,00		1.785.000.000,00		1.821.000.000,00		1.875.630.000,00	
Terwujudnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	1.650.000.000,00	1	1.750.000.000,00	1	1.785.000.000,00	1	1.821.000.000,00	1	1.875.630.000,00	
2.11.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				1.650.000.000,00		1.750.000.000,00		1.785.000.000,00		1.821.000.000,00		1.875.630.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	1.650.000.000,00	1	1.750.000.000,00	1	1.785.000.000,00	1	1.821.000.000,00	1	1.875.630.000,00	
2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				450.000.000,00		685.000.000,00		790.700.000,00		900.000.000,00		927.000.000,00	
Terwujudnya profesionalisme aparatur perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8	50	450.000.000,00	50	685.000.000,00	50	790.700.000,00	50	900.000.000,00	50	927.000.000,00	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	76	200		200		200		200		200		
2.11.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				200.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00		618.000.000,00	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	76	200	200.000.000,00	200	400.000.000,00	200	500.000.000,00	200	600.000.000,00	200	618.000.000,00	
2.11.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				250.000.000,00		285.000.000,00		290.700.000,00		300.000.000,00		309.000.000,00	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8	50	250.000.000,00	50	285.000.000,00	50	290.700.000,00	50	300.000.000,00	50	309.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.705.003.299,00		1.897.500.000,00		1.931.600.000,00		1.966.600.000,00		2.025.373.000,00	
Terwujudnya layanan umum perkantoran perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	2	1.705.003.299,00	2	1.897.500.000,00	2	1.931.600.000,00	2	1.966.600.000,00	2	2.025.373.000,00	
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	14	14		14		14		14		14		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	14		10		10		10		10		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	7		7		7		7		7		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	164	200		200		200		200		200		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0		3		3		3		3		
2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi  Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000,00		22.000.000,00		22.440.000,00		22.900.000,00		23.587.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	14	20.000.000,00	10	22.000.000,00	10	22.440.000,00	10	22.900.000,00	10	23.587.000,00	
2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				625.003.299,00		630.000.000,00		642.600.000,00		655.500.000,00		675.165.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	14	14	625.003.299,00	14	630.000.000,00	14	642.600.000,00	14	655.500.000,00	14	675.165.000,00	
2.11.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				300.000.000,00		325.000.000,00		331.500.000,00		338.500.000,00		348.655.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	7	300.000.000,00	7	325.000.000,00	7	331.500.000,00	7	338.500.000,00	7	348.655.000,00	
2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				75.000.000,00		78.000.000,00		79.560.000,00		81.200.000,00		83.636.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	75.000.000,00	4	78.000.000,00	4	79.560.000,00	4	81.200.000,00	4	83.636.000,00	
2.11.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0	0,00	3	7.500.000,00	3	7.500.000,00	3	7.500.000,00	3	7.500.000,00	
2.11.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				150.000.000,00		150.000.000,00		153.000.000,00		156.000.000,00		160.680.000,00	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	153.000.000,00	2	156.000.000,00	2	160.680.000,00	
2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350.000.000,00		500.000.000,00		510.000.000,00		520.000.000,00		535.600.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	164	200	350.000.000,00	200	500.000.000,00	200	510.000.000,00	200	520.000.000,00	200	535.600.000,00	
2.11.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				185.000.000,00		185.000.000,00		185.000.000,00		185.000.000,00		190.550.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	185.000.000,00	1	185.000.000,00	1	185.000.000,00	1	185.000.000,00	1	190.550.000,00	
2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.412.600.000,00		2.431.000.000,00		2.479.620.000,00		2.530.000.000,00		2.605.900.000,00	
Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1.412.600.000,00	1	2.431.000.000,00	1	2.479.620.000,00	1	2.530.000.000,00	1	2.605.900.000,00	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7	7		7		7		7		7		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	0		25		2		2		2		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	9	6		6		6		6		6		
2.11.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				762.600.000,00		825.000.000,00		841.500.000,00		858.500.000,00		884.255.000,00	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	9	6	762.600.000,00	6	825.000.000,00	6	841.500.000,00	6	858.500.000,00	6	884.255.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		875.000.000,00		892.500.000,00		910.500.000,00		937.815.000,00	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	0	0,00	25	875.000.000,00	2	892.500.000,00	2	910.500.000,00	2	937.815.000,00	
2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				250.000.000,00		275.000.000,00		280.500.000,00		286.500.000,00		295.095.000,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7	7	250.000.000,00	7	275.000.000,00	7	280.500.000,00	7	286.500.000,00	7	295.095.000,00	
2.11.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				400.000.000,00		456.000.000,00		465.120.000,00		474.500.000,00		488.735.000,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	400.000.000,00	1	456.000.000,00	1	465.120.000,00	1	474.500.000,00	1	488.735.000,00	
2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.908.641.600,00		2.072.500.000,00		2.122.000.000,00		2.164.500.000,00		2.228.910.000,00	
Terwujudnya operasional umum perangkat daera	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	9	10	1.908.641.600,00	10	2.072.500.000,00	10	2.122.000.000,00	10	2.164.500.000,00	10	2.228.910.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6	3		3		3		3		3		
2.11.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				17.500.000,00		17.500.000,00		17.500.000,00		17.500.000,00		17.500.000,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2	17.500.000,00	2	17.500.000,00	2	17.500.000,00	2	17.500.000,00	2	17.500.000,00	
2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				523.805.000,00		580.000.000,00		600.000.000,00		612.000.000,00		630.360.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6	3	523.805.000,00	3	580.000.000,00	3	600.000.000,00	3	612.000.000,00	3	630.360.000,00	
2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.367.336.600,00		1.475.000.000,00		1.504.500.000,00		1.535.000.000,00		1.581.050.000,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	9	10	1.367.336.600,00	10	1.475.000.000,00	10	1.504.500.000,00	10	1.535.000.000,00	10	1.581.050.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.494.999.950,00		1.704.000.000,00		1.738.080.000,00		1.774.000.000,00		1.827.220.000,00	
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar berfungsi optimal	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	145	145	1.494.999.950,00	145	1.704.000.000,00	145	1.738.080.000,00	145	1.774.000.000,00	145	1.827.220.000,00	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	67	39		65		65		66		66		
2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				750.000.000,00		855.000.000,00		872.100.000,00		890.000.000,00		916.700.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	67	39	750.000.000,00	65	855.000.000,00	65	872.100.000,00	66	890.000.000,00	66	916.700.000,00	
2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				144.999.950,00		165.000.000,00		168.300.000,00		172.000.000,00		177.160.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	145	145	144.999.950,00	145	165.000.000,00	145	168.300.000,00	145	172.000.000,00	145	177.160.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				600.000.000,00		684.000.000,00		697.680.000,00		712.000.000,00		733.360.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	600.000.000,00	1	684.000.000,00	1	697.680.000,00	1	712.000.000,00	1	733.360.000,00	
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				190.000.000,00		1.105.500.000,00		1.126.512.000,00		833.600.000,00		858.608.000,00	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	89	100	190.000.000,00	100	1.105.500.000,00	100	1.126.512.000,00	100	833.600.000,00	100	858.608.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				150.000.000,00		485.000.000,00		500.000.000,00		204.000.000,00		210.120.000,00	
Terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	0	0	150.000.000,00	1	485.000.000,00	0	500.000.000,00	0	204.000.000,00	0	210.120.000,00	
	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	1		1		1		1		1		
	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen)	0	0		0		1		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota				150.000.000,00		185.000.000,00		200.000.000,00		204.000.000,00		210.120.000,00	
Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	1	150.000.000,00	1	185.000.000,00	1	200.000.000,00	1	204.000.000,00	1	210.120.000,00	
2.11.02.2.01.0003 - Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota				0,00		300.000.000,00		0,00		0,00		0,00	
RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	0	0	0,00	1	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.02.2.01.0004 - Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota				0,00		0,00		300.000.000,00		0,00		0,00	
RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				40.000.000,00		620.500.000,00		626.512.000,00		629.600.000,00		648.488.000,00	
Terselenggaranya Upaya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	0	40.000.000,00	1	620.500.000,00	1	626.512.000,00	1	629.600.000,00	1	648.488.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	0	0		2		1		1		1		
2.11.02.2.02.0004 - Pemantauan dan Evaluasi KLHS				0,00		75.000.000,00		80.000.000,00		81.600.000,00		84.048.000,00	
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	0	0	0,00	2	75.000.000,00	1	80.000.000,00	1	81.600.000,00	1	84.048.000,00	
2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang				0,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		515.000.000,00	
Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	0	0,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	515.000.000,00	
2.11.02.2.02.0006 - Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup				40.000.000,00		45.500.000,00		46.512.000,00		48.000.000,00		49.440.000,00	
Tersusunnya KLHS untuk KRP Lainnya yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Lainnya yang Berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun (Dokumen)	1	1	40.000.000,00	1	45.500.000,00	1	46.512.000,00	1	48.000.000,00	1	49.440.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				3.075.000.000,00		6.930.000.000,00		7.072.680.000,00		7.216.006.000,00		7.432.486.180,00	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Parameter yang Memenuhi Baku Mutu (%)	77,9	78	3.075.000.000,00	79	6.930.000.000,00	80	7.072.680.000,00	81	7.216.006.000,00	82	7.432.486.180,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				1.050.000.000,00		3.505.000.000,00		3.579.180.000,00		3.651.116.000,00		3.760.649.480,00	
Terlaksananya upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	0	2	1.050.000.000,00	4	3.505.000.000,00	4	3.579.180.000,00	4	3.651.116.000,00	4	3.760.649.480,00	
	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	20	0		23		23		23		23		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (Laporan)	20	25		27		30		33		38		
	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim (Laporan)		0		2		2		2		2		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan)		0		2		2		2		2		
2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				500.000.000,00		625.000.000,00		639.540.000,00		652.500.000,00		672.075.000,00	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2	2	500.000.000,00	2	625.000.000,00	2	639.540.000,00	2	652.500.000,00	2	672.075.000,00	
2.11.03.2.01.0006 - Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut				250.000.000,00		340.000.000,00		348.840.000,00		356.000.000,00		366.680.000,00	
Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (Laporan)	20	25	250.000.000,00	27	340.000.000,00	30	348.840.000,00	33	356.000.000,00	38	366.680.000,00	
2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				0,00		990.000.000,00		1.009.800.000,00		1.029.996.000,00		1.060.895.880,00	
Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	20	0	0,00	23	990.000.000,00	23	1.009.800.000,00	23	1.029.996.000,00	23	1.060.895.880,00	
2.11.03.2.01.0009 - Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota				300.000.000,00		750.000.000,00		765.000.000,00		780.300.000,00		803.709.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Beroperasi dan berfungsinya alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	0	2	300.000.000,00	4	750.000.000,00	4	765.000.000,00	4	780.300.000,00	4	803.709.000,00	
2.11.03.2.01.0010 - Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota				0,00		400.000.000,00		408.000.000,00		416.160.000,00		428.644.800,00	
Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan)		0	0,00	2	400.000.000,00	2	408.000.000,00	2	416.160.000,00	2	428.644.800,00	
2.11.03.2.01.0014 - Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota				0,00		400.000.000,00		408.000.000,00		416.160.000,00		428.644.800,00	
Terlaksananya upaya adaptasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim (Laporan)		0	0,00	2	400.000.000,00	2	408.000.000,00	2	416.160.000,00	2	428.644.800,00	
2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				1.675.000.000,00		2.225.000.000,00		2.269.500.000,00		2.314.890.000,00		2.384.336.700,00	
Terlaksananya upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	6	7	1.675.000.000,00	2	2.225.000.000,00	2	2.269.500.000,00	2	2.314.890.000,00	2	2.384.336.700,00	
	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	1	1		3		3		3		3		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat				1.500.000.000,00		725.000.000,00		739.500.000,00		754.290.000,00		776.918.700,00	
Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	6	7	1.500.000.000,00	2	725.000.000,00	2	739.500.000,00	2	754.290.000,00	2	776.918.700,00	
2.11.03.2.02.0003 - Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				175.000.000,00		1.500.000.000,00		1.530.000.000,00		1.560.600.000,00		1.607.418.000,00	
Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	1	1	175.000.000,00	3	1.500.000.000,00	3	1.530.000.000,00	3	1.560.600.000,00	3	1.607.418.000,00	
2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				350.000.000,00		1.200.000.000,00		1.224.000.000,00		1.250.000.000,00		1.287.500.000,00	
Terlaksananya upaya pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	0,075	2	350.000.000,00	2,5	1.200.000.000,00	3	1.224.000.000,00	3,5	1.250.000.000,00	4	1.287.500.000,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
2.11.03.2.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran				50.000.000,00		100.000.000,00		102.000.000,00		105.000.000,00		108.150.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	102.000.000,00	1	105.000.000,00	1	108.150.000,00	
2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi				300.000.000,00		1.100.000.000,00		1.122.000.000,00		1.145.000.000,00		1.179.350.000,00	
kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	0,075	2	300.000.000,00	2,5	1.100.000.000,00	3	1.122.000.000,00	3,5	1.145.000.000,00	4	1.179.350.000,00	
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				67.320.871.151,00		69.982.939.000,00		72.357.000.000,00		73.803.060.000,00		76.017.151.800,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH yang dikelola (%)	16,49	16,54	67.320.871.151,00	16,54	69.982.939.000,00	16,54	72.357.000.000,00	16,54	73.803.060.000,00	16,54	76.017.151.800,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				63.170.871.151,00		63.782.939.000,00		66.033.000.000,00		67.352.560.000,00		69.373.136.800,00	
Terlaksananya pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	0	0	63.170.871.151,00	1	63.782.939.000,00	1	66.033.000.000,00	1	67.352.560.000,00	1	69.373.136.800,00	
	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	345,73	345,73		345,75		345,77		345,79		345,81		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	10	10		10		10		10		10		
2.11.04.2.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				250.000.000,00		305.000.000,00		310.000.000,00		315.000.000,00		324.450.000,00	
Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	1	1	250.000.000,00	1	305.000.000,00	1	310.000.000,00	1	315.000.000,00	1	324.450.000,00	
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				62.770.871.151,00		59.827.939.000,00		62.000.000.000,00		63.240.000.000,00		65.137.200.000,00	
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	345,73	345,73	62.770.871.151,00	345,75	59.827.939.000,00	345,77	62.000.000.000,00	345,79	63.240.000.000,00	345,81	65.137.200.000,00	
2.11.04.2.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				150.000.000,00		150.000.000,00		153.000.000,00		156.060.000,00		160.741.800,00	
Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	10	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	153.000.000,00	10	156.060.000,00	10	160.741.800,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya				0,00		3.500.000.000,00		3.570.000.000,00		3.641.500.000,00		3.750.745.000,00	
Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	0	0	0,00	1	3.500.000.000,00	1	3.570.000.000,00	1	3.641.500.000,00	1	3.750.745.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH yang dikelola (%)	16,49	16,54	67.320.871.151,00	16,54	69.982.939.000,00	16,54	72.357.000.000,00	16,54	73.803.060.000,00	16,54	76.017.151.800,00	2.11.0.00.0.00.01.0001 - UPTD KEBUN RAYA BALIKPAPAN
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				4.150.000.000,00		6.200.000.000,00		6.324.000.000,00		6.450.500.000,00		6.644.015.000,00	
Terlaksananya pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	309,22	309,22	4.150.000.000,00	309,22	6.200.000.000,00	309,22	6.324.000.000,00	309,22	6.450.500.000,00	309,22	6.644.015.000,00	
2.11.04.2.01.0003 - Pengelolaan Kebun Raya				4.150.000.000,00		6.200.000.000,00		6.324.000.000,00		6.450.500.000,00		6.644.015.000,00	
Kebun Raya yang Dikelola	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	309,22	309,22	4.150.000.000,00	309,22	6.200.000.000,00	309,22	6.324.000.000,00	309,22	6.450.500.000,00	309,22	6.644.015.000,00	
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				200.000.000,00		130.000.000,00		132.600.000,00		136.500.000,00		140.595.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah Limbah B3 yang Terkelola (Ton)	44.687	44.787	200.000.000,00	44.887	130.000.000,00	44.987	132.600.000,00	45.087	136.500.000,00	45.187	140.595.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3				200.000.000,00		30.000.000,00		30.600.000,00		31.500.000,00		32.445.000,00	
Terlaksananya Fasilitas Penerbitan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 Sesuai Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	15	17	200.000.000,00	19	30.000.000,00	21	30.600.000,00	23	31.500.000,00	25	32.445.000,00	
2.11.05.2.01.0005 - Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)				200.000.000,00		30.000.000,00		30.600.000,00		31.500.000,00		32.445.000,00	
Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	15	17	200.000.000,00	19	30.000.000,00	21	30.600.000,00	23	31.500.000,00	25	32.445.000,00	
2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,00		100.000.000,00		102.000.000,00		105.000.000,00		108.150.000,00	
Terlaksananya upaya pengumpulan Limbah B3 dalam satu daerah	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)			0,00	60	100.000.000,00	70	102.000.000,00	80	105.000.000,00	90	108.150.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11.05.2.02.0004 - Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota				0,00		100.000.000,00		102.000.000,00		105.000.000,00		108.150.000,00	
terlaksananya pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)			0,00	60	100.000.000,00	70	102.000.000,00	80	105.000.000,00	90	108.150.000,00	
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				625.000.000,00		913.500.000,00		1.069.770.000,00		1.124.500.000,00		1.158.235.000,00	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis (%)	5,30	5,20	625.000.000,00	5,15	913.500.000,00	5,10	1.069.770.000,00	5,05	1.124.500.000,00	5,00	1.158.235.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				625.000.000,00		913.500.000,00		1.069.770.000,00		1.124.500.000,00		1.158.235.000,00	
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang melaksanakan izin lingkungan dan izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	90	95	625.000.000,00	105	913.500.000,00	110	1.069.770.000,00	115	1.124.500.000,00	120	1.158.235.000,00	
	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	40	45		55		60		65		70		
	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	2	2		5		5		5		5		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11.06.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				175.000.000,00		256.500.000,00		261.630.000,00		300.000.000,00		309.000.000,00	
Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	90	95	175.000.000,00	105	256.500.000,00	110	261.630.000,00	115	300.000.000,00	120	309.000.000,00	
2.11.06.2.01.0007 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup				50.000.000,00		57.000.000,00		58.140.000,00		59.500.000,00		61.285.000,00	
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	2	2	50.000.000,00	5	57.000.000,00	5	58.140.000,00	5	59.500.000,00	5	61.285.000,00	
2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				400.000.000,00		600.000.000,00		750.000.000,00		765.000.000,00		787.950.000,00	
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	40	45	400.000.000,00	55	600.000.000,00	60	750.000.000,00	65	765.000.000,00	70	787.950.000,00	
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				2.141.000.000,00		1.750.000.000,00		1.880.060.000,00		1.918.000.000,00		1.975.540.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	84,09	85	2.141.000.000,00	85,5	1.750.000.000,00	86	1.880.060.000,00	86,5	1.918.000.000,00	87	1.975.540.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.141.000.000,00		1.750.000.000,00		1.880.060.000,00		1.918.000.000,00		1.975.540.000,00	
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	100	102	2.141.000.000,00	110	1.750.000.000,00	115	1.880.060.000,00	120	1.918.000.000,00	125	1.975.540.000,00	
	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	107	110		115		120		125		130		
	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	200	750		800		850		900		950		
2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				315.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00		510.000.000,00		525.300.000,00	
Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	100	102	315.000.000,00	110	450.000.000,00	115	500.000.000,00	120	510.000.000,00	125	525.300.000,00	
2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup				1.476.000.000,00		550.000.000,00		561.000.000,00		572.500.000,00		589.675.000,00	
Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	200	750	1.476.000.000,00	800	550.000.000,00	850	561.000.000,00	900	572.500.000,00	950	589.675.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				350.000.000,00		750.000.000,00		819.060.000,00		835.500.000,00		860.565.000,00	
Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	107	110	350.000.000,00	115	750.000.000,00	120	819.060.000,00	125	835.500.000,00	130	860.565.000,00	
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				716.000.000,00		850.000.000,00		867.000.000,00		884.500.000,00		911.035.000,00	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	67,69	68,00	716.000.000,00	68,50	850.000.000,00	69,00	867.000.000,00	69,50	884.500.000,00	70,00	911.035.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				716.000.000,00		850.000.000,00		867.000.000,00		884.500.000,00		911.035.000,00	
Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota kepada masyarakat	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	116	116	716.000.000,00	117	850.000.000,00	118	867.000.000,00	119	884.500.000,00	120	911.035.000,00	
2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				716.000.000,00		850.000.000,00		867.000.000,00		884.500.000,00		911.035.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	116	116	716.000.000,00	117	850.000.000,00	118	867.000.000,00	119	884.500.000,00	120	911.035.000,00	
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				200.000.000,00		300.000.000,00		306.000.000,00		312.120.000,00		321.483.600,00	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%)	100	100	200.000.000,00	100	300.000.000,00	100	306.000.000,00	100	312.120.000,00	100	321.483.600,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				200.000.000,00		300.000.000,00		306.000.000,00		312.120.000,00		321.483.600,00	
Terlaksananya penyelesaian pengaduan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	35	40	200.000.000,00	45	300.000.000,00	50	306.000.000,00	55	312.120.000,00	60	321.483.600,00	
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				200.000.000,00		300.000.000,00		306.000.000,00		312.120.000,00		321.483.600,00	
Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	35	40	200.000.000,00	45	300.000.000,00	50	306.000.000,00	55	312.120.000,00	60	321.483.600,00	
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				87.000.000.000,00		101.530.000.000,00		278.723.164.000,00		284.429.136.000,00		292.962.010.080,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan (%)	99	99,2	87.000.000.000,00	99,3	101.530.000.000,00	99,4	278.723.164.000,00	99,5	284.429.136.000,00	99,6	292.962.010.080,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				74.000.000.000,00		85.030.000.000,00		86.730.600.000,00		88.569.780.000,00		91.226.873.400,00	
Terlaksananya pengelolaan sampah melalui penanganan dan pengurangan sampah	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	1	1	74.000.000.000,00	1	85.030.000.000,00	1	86.730.600.000,00	1	88.569.780.000,00	1	91.226.873.400,00	
	Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)	55.320,36	65.605,70		68.920,60		72.312,15		75.780,35		79.325,21		
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	141.099,28	137.771,96		138.467,75		139.094,55		139.652,37		140.141,20		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	50	15		15		15		15		15		
	Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ditangani (Ton)	0,1361	0		0,2361		0,2861		0,3361		0,3861		
2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				6.000.000.000,00		7.410.000.000,00		7.558.200.000,00		7.800.000.000,00		8.034.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	50	15	6.000.000.000,00	15	7.410.000.000,00	15	7.558.200.000,00	15	7.800.000.000,00	15	8.034.000.000,00	
2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota				200.000.000,00		228.000.000,00		232.560.000,00		250.000.000,00		257.500.000,00	
Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	1	1	200.000.000,00	1	228.000.000,00	1	232.560.000,00	1	250.000.000,00	1	257.500.000,00	
2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan				67.500.000.000,00		76.950.000.000,00		78.489.000.000,00		80.058.780.000,00		82.460.543.400,00	
Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	141.099,28	137.771,96	67.500.000.000,00	138.467,75	76.950.000.000,00	139.094,55	78.489.000.000,00	139.652,37	80.058.780.000,00	140.141,20	82.460.543.400,00	
2.11.11.2.01.0029 - Pelaksanaan Penanganan Sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				0,00		100.000.000,00		102.000.000,00		105.000.000,00		108.150.000,00	
Terlaksananya penanganan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ditangani (Ton)	0,1361	0	0,00	0,2361	100.000.000,00	0,2861	102.000.000,00	0,3361	105.000.000,00	0,3861	108.150.000,00	
2.11.11.2.01.0030 - Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah				300.000.000,00		342.000.000,00		348.840.000,00		356.000.000,00		366.680.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)	55.320,36	65.605,70	300.000.000,00	68.920,60	342.000.000,00	72.312,15	348.840.000,00	75.780,35	356.000.000,00	79.325,21	366.680.000,00	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan (%)	99	99,2	87.000.000.000,00	99,3	101.530.000.000,00	99,4	278.723.164.000,00	99,5	284.429.136.000,00	99,6	292.962.010.080,00	2.11.0.00.0.00.01.0002 - UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH MANGGAR KOTA BALIKPAPAN
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				13.000.000.000,00		16.500.000.000,00		191.992.564.000,00		195.859.356.000,00		201.735.136.680,00	
Terlaksananya pengelolaan sampah melalui penanganan dan pengurangan sampah	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	141.099,28	137.771,96	13.000.000.000,00	138.467,75	16.500.000.000,00	139.094,55	191.992.564.000,00	139.652,37	195.859.356.000,00	140.141,20	201.735.136.680,00	
2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				13.000.000.000,00		16.500.000.000,00		191.992.564.000,00		195.859.356.000,00		201.735.136.680,00	
Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	141.099,28	137.771,96	13.000.000.000,00	138.467,75	16.500.000.000,00	139.094,55	191.992.564.000,00	139.652,37	195.859.356.000,00	140.141,20	201.735.136.680,00	



**Tabel 4.4**  
**Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas**  
**Pembangunan Daerah**  
**Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP		
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
			Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan rehabilitasi	
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati		
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Kebun Raya	
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah		
			Pengelolaan Sampah	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
			Penanganan sampah melalui pengangkutan	
			Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	

Sumber: DLH, 2025

Program-program prioritas pada **Tabel 4.4** disesuaikan dan diselaraskan dengan proyek prioritas berdasarkan dokumen RJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029. Berikut merupakan proyek-proyek prioritas tersebut.

**1. Pembangunan TPST/PDU**

Proyek ini mencakup pengembangan beberapa Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), yaitu di Kota Hijau, Karang Joang, Graha Indah, Balikpapan Barat dan Timur. Dimulai tahun 2026 dengan pembangunan sarana prasarana pengolahan sampah, dan dilanjutkan bertahap hingga 2029. Ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan sampah kota. Proyek merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

**2. Pembangunan TPA Sampah Manggar**

Proyek strategis berbasis Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Saat ini pada tahap OBC (*Outline Business Case*) dan akan masuk tahap *financial close* tahun 2026, konstruksi di 2027–2028, dan operasional pada 2029. Proyek ini penting untuk mengatasi keterbatasan daya tampung TPA eksisting. Proyek merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), Penelitian dan Pengembangan (Litbang), dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU)

**3. Pembangunan Balikpapan Baru**

Kawasan ini telah diserahkan pengembangnya, dan pada 2026 akan dilakukan DED (*Detail Engineering Design*), dilanjutkan konstruksi pada 2027. Termasuk dalam program pengembangan kawasan baru berbasis tata ruang. Proyek merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

**4. Pembangunan Kawasan Olahraga Terpadu (KOT)**

Masterplan disusun tahun 2014 dan akan direviu kembali pada 2026. Pengembangan taman dan fasilitas dilakukan bertahap: tahap I pada 2027, tahap II pada 2028, dan tahap III pada 2029. Kawasan ini diharapkan jadi pusat ruang terbuka hijau multifungsi berbasis olahraga. Proyek merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

**5. Pengembangan Family Park/RBRA**

Mulai tahun 2026, dilakukan pengadaan taman kota dengan pendekatan ramah keluarga (*family park*), secara konsisten dilanjutkan hingga 2029. Ini bagian dari penguatan fungsi taman sebagai ruang publik inklusif. Proyek merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

**6. Pengadaan dan Penanaman Pohon Peneduh**

Lokasi prioritas seperti Bundaran Km 13 dan Mulcim menjadi titik awal pengadaan dan penanaman. Kegiatan ini berlangsung setiap tahun dari 2026 hingga 2029, sebagai bagian dari strategi penghijauan dan pengendalian iklim mikro kota. Proyek merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

**4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra DLH 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) DLH**

Rencana kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 disusun untuk menggambarkan target kinerja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Rencana kinerja ini diukur melalui alat ukur atau indikator kinerja yang relevan dengan kewenangan dan tugas DLH. Kinerja sendiri diartikan sebagai pencapaian dari *output*, *outcome*, maupun dampak yang dihasilkan melalui pelaksanaan subkegiatan, kegiatan, program, maupun sasaran, dengan memanfaatkan sumber daya pembangunan yang tersedia.

Indikator Kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang menggambarkan tingkat keberhasilan suatu kegiatan, program, atau sasaran tertentu. Indikator ini dapat berbentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), maupun dampak (*impact*), yang mencerminkan sejauh mana tujuan pembangunan lingkungan hidup tercapai.

Dalam dokumen ini, indikator kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dibedakan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Kedua jenis indikator ini menjadi tolok ukur kinerja dinas dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan publik di bidang lingkungan secara efektif dan akuntabel.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran utama yang mencerminkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup. Terdapat sejumlah indikator yang ditetapkan sebagai IKU DLH Kota Balikpapan, sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.5.

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah	Indeks	68,75	68,89	69,04	69,18	69,32	69,47	
2.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	64,40	64,60	64,80	65,00	65,20	65,40	
3.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	83,83	84,03	84,23	84,43	84,63	84,83	
4.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	61,51	61,58	61,65	61,72	61,79	61,86	
5.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	67,70	67,80	67,90	68,00	68,10	68,20	
6.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	76.33	77.23	78.13	79.03	79.93	80.83	

Sumber: DLH, 2025

**4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. IKK Dinas Lingkungan Hidup mencakup indikator-indikator kunci pada level *outcome*, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan

Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 mengenai Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Seluruh IKK beserta target target capaian tahunan dari tahun 2025 hingga 2030 menjadi bagian integral dari Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan dan disajikan secara lengkap pada Tabel berikut:

**Tabel 4. 6**  
**Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah	komulatif	Indeks	61,51	68,75	68,89	69,04	69,18	69,32	69,47	Indikator Tujuan PD
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	positif	Indeks	67,6	67,7	67,8	67,9	68	68,1	68,2	Indikator Sasaran PD
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	positif	Nilai	73,4	76,33	77,23	78,13	79,03	79,93	80,83	Indikator Sasaran PD
4	Indeks Kualitas Air	positif	Indeks	54,49	64,4	64,6	64,8	65	65,2	65,4	Indikator Sasaran PD
5	Indeks Kualitas Udara	positif	Indeks	86.28	83,83	84,03	84,23	84,43	84,63	84,83	Indikator Sasaran PD
6	Indeks Kualitas Lahan	positif	Indeks	59,2	61,51	61,58	61,65	61,72	61,79	61,86	Indikator Sasaran PD
7	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	positif	%	67,69	67,9	68	68,5	69	69,5	70	Indikator Program
8	Jumlah Limbah B3 yang Terkelola	positif	Ton	44.687	44.687	44.787	44.887	44.987	45.087	45.187	Indikator Program
9	Persentase Parameter yang Memenuhi Baku Mutu	positif	%	77,9	77,9	78	79	80	81	82	Indikator Program
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	positif	Nilai	87,07	88,18	89,18	89,39	89,59	89,8	90	Indikator Program
11	Persentase Pengelolaan Persampahan	positif	%	99	99,1	99,2	99,3	99,4	99,5	99,6	Indikator Program
12	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Program
13	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	positif	%	84,09	84,59	85	85,5	86	86,5	87	Indikator Program
14	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	positif	%	89	100	100	100	100	100	100	Indikator Program
15	Persentase RTH yang dikelola	positif	%	16,49	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	Indikator Program
16	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis	negatif	%	5,3	5,25	5,2	5,15	5,1	5,05	5	Indikator Program

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
17	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	negatif	%	5,3	5,25	5,2	5,15	5,1	5,05	5	Indikator LPPD
18	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	positif	%	99	99,1	99,2	99,3	99,4	99,5	99,6	Indikator LPPD
19	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	positif	Ton	55.320,36	60.369,16	65.605.70	68,920.60	72.312,15	75.780,35	79.325,21	Indikator Sdgs
20	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	positif	%	99	99,1	99,2	99,3	99,4	99,5	99,6	Indikator Sdgs
21	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	positif	%	38,29	38,29	38,29	38,29	38,29	38,29	38,29	Indikator Sdgs
22	Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya	positif	%	91,42	91,52	91,62	91,72	91,82	91,92	92,02	Indikator Sdgs
23	Rencana pemanfaatan Keaneekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis	positif	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Indikator Sdgs

Sumber: DLH, 2025

## BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 ini merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang disusun guna mendukung penyelenggaraan urusan lingkungan hidup di Kota Balikpapan untuk lima Tahun kedepan dan merupakan dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025–2029.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 sampai dengan 2029 bagi seluruh aparatur dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan serta merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) per Tahun dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil perencanaan kerja setiap tahunnya.

## L. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 adalah sebuah dokumen perencanaan yang berisikan arah, kebijakan, tujuan, sasaran dan program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dalam kurun/jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, yakni Tahun 2025-2029. Renstra ini disusun untuk mencapai visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan publik yang efisien, efektif, dan transparan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Adapun latar belakang dari penyusunan Renstra Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 ini berfokus pada upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, memperkuat sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang menjadi latar belakang penting dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, antara lain:

##### a. Peningkatan Jumlah Penduduk

Dengan adanya isu strategis terkait Kota Balikpapan sebagai Kota Penyangga Ibu Kota Negara (IKN) dan adanya mega proyek pembangunan kilang minyak yang dilakukan oleh PT. Pertamina Patraniaga di Kota Balikpapan, maka dapat memicu pertambahan penduduk yang akan datang dan menetap di Kota Balikpapan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka tantangan untuk memberikan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efisien dan akurat menjadi semakin besar. Oleh sebab itu Rencana Strategis Disdukcapil Kota Balikpapan perlu memperhatikan pertumbuhan jumlah penduduk serta distribusinya di berbagai wilayah.

##### b. Peningkatan Kebutuhan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Masyarakat semakin membutuhkan layanan publik khususnya di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses. Hal ini mencakup layanan seperti perekaman dan pencetakan KTP-el, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, serta pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil lainnya yang berkaitan dengan identitas dan status hukum seseorang.

##### c. Transformasi Digital

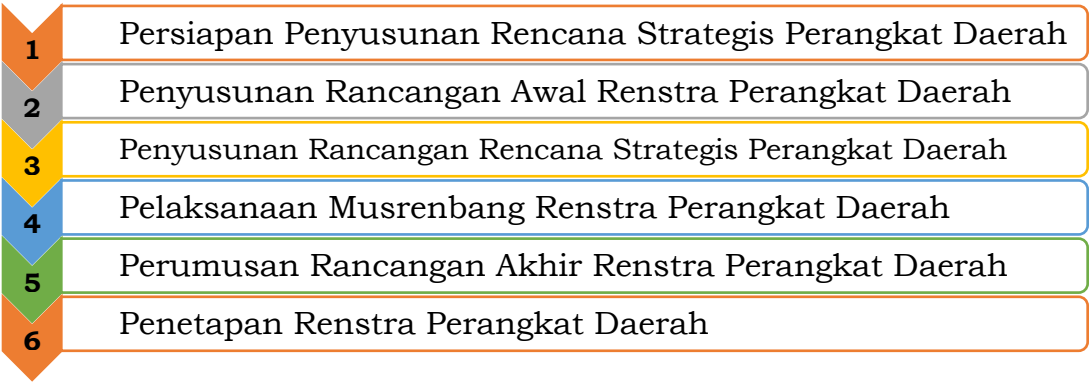
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Pemerintah berusaha untuk mengadopsi sistem digital dalam memberikan pelayanan publik, termasuk dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan perlu melakukan pembaharuan sistem informasi dan infrastruktur teknologi untuk mempercepat proses pelayanan serta mengurangi potensi kesalahan manusia dalam pengelolaan data kependudukan.

##### d. Pencatatan Sipil yang Akurat dan Tepat Waktu

Proses pencatatan sipil yang akurat dan tepat waktu sangat penting untuk memastikan bahwa data penduduk selalu mutakhir dan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan administrasi negara, seperti pemilihan umum, perencanaan pembangunan, serta pembagian bantuan sosial. Dalam hal ini Dinas

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kualitas dan akurasi data kependudukan tersebut.
- e. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat  
Salah satu tujuan utama dari rencana strategis adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sosialisasi mengenai pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tepat menjadi salah satu fokus utama agar masyarakat lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil mereka.
  - f. Penguatan Sumber Daya Manusia  
Selain dari aspek masyarakat (pemohon), Disdukcapil Kota Balikpapan juga harus memperhatikan pengembangan dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada agar petugas dapat melayani masyarakat dengan lebih profesional dan terampil. Rencana Strategis ini juga harus mencakup program pengembangan kapasitas SDM, terutama dalam hal pemahaman teknologi, pelayanan pelanggan, dan keahlian administrasi.
  - g. Pengelolaan Data yang Terintegrasi  
Rencana strategis ini juga harus mencakup upaya untuk memastikan bahwa data kependudukan yang ada terkelola dengan baik dan benar, terintegrasi dengan sistem nasional, serta aman dari kebocoran atau penyalahgunaan dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Hal ini penting untuk mendukung keputusan Pemerintah dalam merencanakan pembangunan yang berbasis data.
  - h. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi  
Dalam upaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Disdukcapil Kota Balikpapan perlu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan data dan layanan kepada masyarakat. Rencana Strategis ini juga harus mencakup mekanisme pengawasan yang efektif serta sistem pelaporan yang jelas. Dengan terlaksananya hal ini maka Renstra Disdukcapil Kota Balikpapan disusun dengan tujuan terciptanya sistem administrasi kependudukan yang efisien, akurat, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, serta mendukung pembangunan nasional yang lebih terencana dan berbasis data yang valid.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka tahapan penyusunan Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 1.1**  
**Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Berakhirnya periode Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 mendorong untuk disusunnya Rencana



Strategis yang baru sebagai bahan acuan dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan, program dan kegiatan Disdukcapil Kota Balikpapan untuk periode lima tahun yang akan datang. Proses penyusunan Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029 ini dimulai dengan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir Renstra, dan penetapan Renstra.

Penyusunan Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan permasalahan, isu strategis, arah kebijakan pelayanan yang perlu dikembangkan, dan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan yakni **“Terciptanya pelayanan publik yang semakin prima dan adaptif transformasi digital”**. Substansi dari ketetapan-ketetapan yang telah dimuat dalam Renstra akan menjadi acuan dasar bagi Disdukcapil dalam pelaksanaan program, kegiatan dan pelayanan publik yang dilakukan.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 memiliki dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
25. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
26. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
29. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen;

41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
43. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045;
44. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 54);
45. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2045;
46. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 Nomor 1).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, antara lain:

1. Untuk memberikan arah kebijakan dan program strategis dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah;
2. Sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja) dan pelaksanaan kegiatan;
3. Untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/Kota di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun Tujuan dari Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan arah dan kebijakan strategis penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil, termasuk pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, dan pembuatan dokumen kependudukan seperti KTP-el, Kartu Keluarga (KK), dan Akta;
3. Mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan serta merumuskan strategi penyelesaiannya;
4. Mendorong pemanfaatan data kependudukan sebagai basis perencanaan pembangunan yang akurat dan terintegrasi;
5. Mewujudkan pelayanan berbasis digital dan inovatif yang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan masyarakat.

**1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyajian Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

<b>Bab I</b>	<b>Pendahuluan</b> Pada bab ini memuat penjelasan secara ringkas tentang isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan.
<b>Bab II</b>	<b>Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah</b> Pada bab ini memuat penjelasan tentang gambaran umum pelayanan yang terdapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, yang meliputi: gambaran pelayanan (yang memuat tentang tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan, dan mitra Disdukcapil Kota Balikpapan dalam memberikan pelayanan) dan permasalahan serta isu strategis yang muncul di Disdukcapil Kota Balikpapan.
<b>Bab III</b>	<b>Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan</b> Pada bab ini memuat penjelasan tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang ada pada Disdukcapil Kota Balikpapan yang meliputi: tujuan Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029, sasaran Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029, strategi Disdukcapil Kota Balikpapan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029, dan arah kebijakan Disdukcapil Kota Balikpapan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.
<b>Bab IV</b>	<b>Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan</b> Pada bab ini memuat penjelasan tentang program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan pelayanan yang meliputi: uraian program, uraian kegiatan, uraian sub kegiatan (berserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif), uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Disdukcapil melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Disdukcapil Kota Balikpapan, dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
<b>Bab V</b>	<b>Penutup</b> Pada bab ini memuat penjelasan tentang isi keseluruhan dokumen Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029 secara ringkas yang dirangkum pada sub bab kesimpulan, dan pelaksanaan serta evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang pelayanan publik.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

## **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Balikpapan adalah Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Tugasnya berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Adapun penjabaran atas uraian tugas Disdukcapil Kota Balikpapan tertuang pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **2.1.1 Tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah yang termaktub pada lampiran XV poin II, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

#### **I. TUGAS DAN FUNGSI**

Adapun tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

##### **A. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya;
- c. dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- f. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- g. pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- h. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- i. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- j. pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
- k. pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

## **B. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian:

- a. perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
- b. administrasi keuangan;
- c. administrasi barang milik Daerah pada Dinas;
- d. administrasi kepegawaian;
- e. administrasi umum;
- f. pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah;
- g. pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah;
- h. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah;
- i. layanan informasi dan pengaduan;
- j. dan pembinaan pelayanan publik.

Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastamaan;
- f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran Dinas;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. pembinaan dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik;
- k. pengelolaan survei kepuasan masyarakat;
- l. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- m. pengelolaan informasi dan dokumentasi, serta pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksana;
- n. pengoordinasian pengelolaan dan pengembangan sistem teknologi informasi;
- o. pengoordinasian bidang dan UPTD;
- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat terdiri atas:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
  - b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
  - c. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
  - d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
  - e. menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
  - f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
  - g. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
  - h. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
  - i. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
  - j. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;

- k. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
  - l. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
  - m. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
  - n. memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
  - o. mengelola informasi dan dokumentasi, dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;
  - p. menyusun tatalaksana dan tatakelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
  - q. memfasilitasi pembinaan tatakelola pelayanan publik;
  - r. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.
2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
    - 1) rencana strategis;
    - 2) rencana kerja;
    - 3) rencana kerja tahunan;
    - 4) penetapan kinerja; dan
    - 5) laporan kinerja.
  - b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
  - c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
  - d. melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
  - e. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
  - f. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
  - g. mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
  - h. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
  - i. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
  - j. mengoordinir dan meneliti anggaran;
  - k. menyusun laporan keuangan;
  - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.

### **C. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- b. penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- c. perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;



- e. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk; pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pengelompokan substansi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan uraian tugas yang terdiri atas:

1. Substansi Identitas Penduduk, mempunyai tugas:
  - a. menyusun program dan kegiatan Substansi Identitas Penduduk;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
  - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
  - d. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
  - e. melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
  - f. melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
  - g. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
  - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.
2. Substansi Pindah Datang Penduduk, mempunyai tugas:
  - a. menyusun program dan kegiatan Substansi Pindah Datang Penduduk;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pindah datang penduduk;
  - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pindah datang penduduk;
  - d. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk;
  - e. melaksanakan pelayanan pindah datang penduduk;
  - f. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk;
  - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.
- 3. Substansi Pendataan Penduduk, mempunyai tugas:
  - a. menyusun program dan kegiatan Substansi Pendataan Penduduk;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pelaksanaan pendataan penduduk;
  - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pendataan penduduk;
  - d. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pendataan penduduk;
  - e. melaksanakan pendataan penduduk;
  - f. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan penduduk;
  - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.

#### **D. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- b. penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- c. perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- f. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- g. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pengelompokan substansi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan uraian tugas yang terdiri atas:

- 1. Substansi Kelahiran, mempunyai tugas:
  - a. menyusun program dan kegiatan Substansi Kelahiran;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan kelahiran;
  - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan kelahiran;
  - d. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran;
  - e. melaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran;
  - f. melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan kelahiran;
  - g. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran;
  - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - i. melaksanakan fungsi yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.

2. Substansi Perkawinan dan Perceraian, mempunyai tugas:
  - a. menyusun program dan kegiatan Substansi Perkawinan dan Perceraian;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
  - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
  - d. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pencatatan perkawinan dan perceraian;
  - e. melaksanakan pelayanan pencatatan pencatatan perkawinan dan perceraian;
  - f. melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
  - g. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
  - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.
3. Substansi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian, mempunyai tugas:
  - a. menyusun program dan kegiatan Substansi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
  - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
  - d. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
  - e. melaksanakan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
  - f. melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
  - g. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
  - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - i. melaksanakan fungsi yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.

**E. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data**

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- b. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pengelompokan substansi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data menyelenggarakan uraian tugas yang terdiri atas:

1. Substansi Sistem informasi Administrasi Kependudukan, mempunyai tugas:
  - a. menyusun program dan kegiatan Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  - b. menyiapkan koordinasi sistem informasi administrasi kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. menyiapkan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis sistem informasi administrasi kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
  - d. menyiapkan dan melaksanakan sistem informasi administrasi kependudukan;
  - e. menyiapkan dan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
  - f. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
  - g. melaksanakan pengelolaan, pengamanan dan kesinambungan perangkat keras maupun perangkat lunak yang merupakan aset Dinas;
  - h. melaksanakan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi dan aplikasi sistem informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan tugas jabatan fungsional terkait pengolahan data di lingkungan dinas;

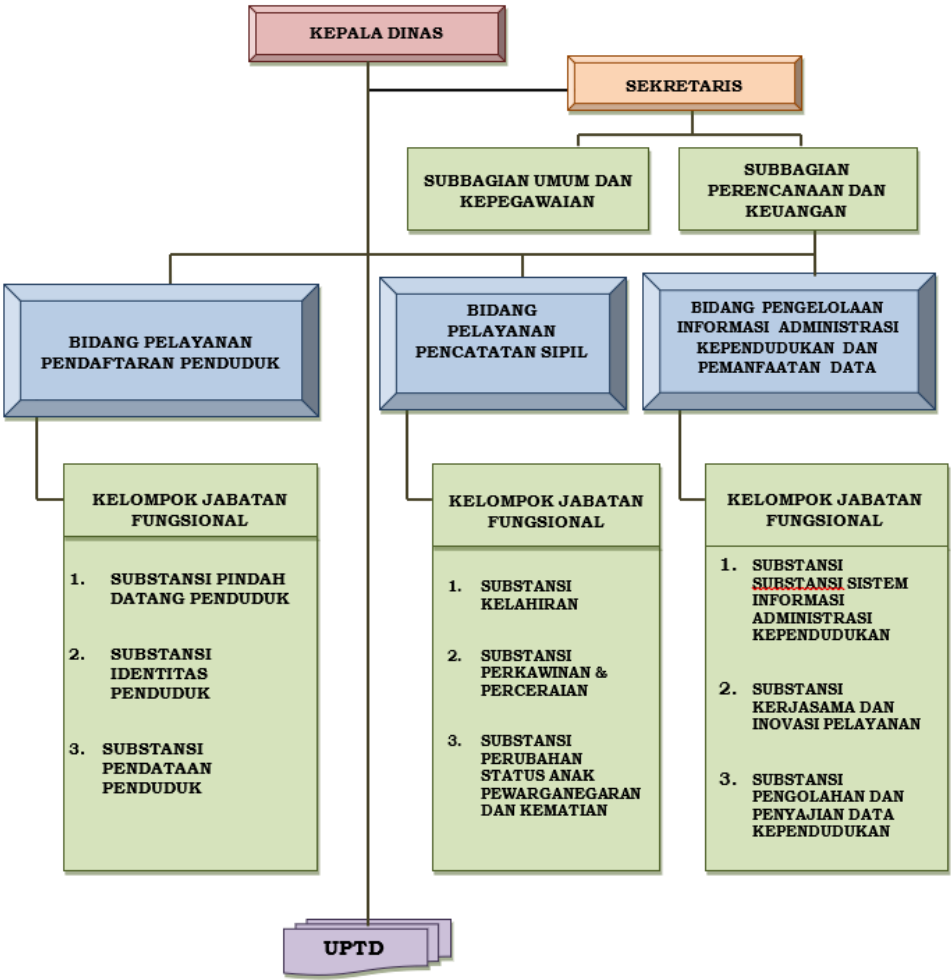
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh pimpinan/atasan terkait dengan tugasnya.
2. Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, mempunyai tugas:
- a. menyusun program dan kegiatan Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
  - b. menyiapkan koordinasi pengolahan dan penyajian data kependudukan;
  - c. menyiapkan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan penyajian data kependudukan;
  - d. menyiapkan dan melaksanakan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
  - e. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
  - f. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan layanan administrasi kependudukan;
  - g. melaksanakan pengklasifikasian dan pengkodifikasian arsip kependudukan dan pencatatan sipil;
  - h. menyelenggarakan pemeliharaan kependudukan dan pencatatan sipil;
  - i. arsip dan dokumen mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan tugas jabatan fungsional arsiparis di lingkungan dinas;
  - j. melaksanakan penyusutan arsip kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan tugasnya.
3. Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan, mempunyai tugas:
- a. menyusun program dan kegiatan Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
  - b. menyiapkan koordinasi kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - c. menyiapkan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - d. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis kerja sama administrasi kependudukan;
  - e. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
  - f. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - g. melaksanakan administrasi kerjasama dan inovasi administrasi kependudukan;
  - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan tugasnya

## **II. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris Dinas, membawahi:
  - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- 3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
  - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
- 4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi:
  - 4) Kelompok Jabatan Fungsional
- 5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi:
  - 5) Kelompok Jabatan Fungsional
- 6. UPTD

Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Disdukcapil Kota Balikpapan**

**2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Berdasarkan struktur organisasi yang tersaji di atas dapat kita ketahui bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan seharusnya unsur pejabat minimal terdiri dari 7 (tujuh) Pejabat

Struktural dan 9 (sembilan) kelompok jabatan fungsional. Jumlah keseluruhan sumber daya yang terdapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan saat ini sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang, yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 33 (tiga puluh tiga) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 10 (sepuluh) orang Non ASN. Adapun rincian sumber daya aparatur Disdukcapil Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Sumber Daya Aparatur Disdukcapil Kota Balikpapan**

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan PNS				Golongan PPPK			Pendidikan				
	L	P	IV	III	II	I	IX	VII	V	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11	12
Kepala Dinas	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Sekretaris	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Kepala Bidang	-	3	2	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
Substansi (Analisis Kebijakan Ahli Muda)	4	3	-	7	-	-	-	-	-	2	4	-	1	-
Kepala Sub Bagian	-	2	-	1		-	-	-	-	1	1	-	-	-
Fungsional Khusus	3	1		3	1	-	1	-	-	-	-	4	-	-
Pelaksana	10	4	-	10	8	-	1	8	-	-	2	14	11	-
PPPK	17	16	-	-	-	-	11	9	13	-	11	9	13	-
Jumlah PNS & PPPK	35	30	4	21	9	-	13	17	13	6	20	27	25	-
Non ASN	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5	-
Jumlah Non ASN	10													
Jumlah ASN dan Non ASN	41	34	4	21	9	-	13	17	13	6	24	28	30	-
TOTAL	75		4	21	9	-	13	17	13	6	24	28	30	-

Sumber : Data Simpeg Tahun 2025

Adapun rincian Sumber Daya Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan berdasarkan komposisi PNS, PPPK, dan Naban dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Sumber Daya Aparatur (ASN dan Non ASN)**  
**Disdukcapil Kota Balikpapan**

No .	J a b a t a n	Jumlah
1	Kepala	1 orang
2	Sekretaris	1 orang
3	Kepala Bidang	3 orang
	1 Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	2 Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
	3 Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administarsi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	
4	Kepala Sub Bagian	2 orang
	1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
	2 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda	7 orang
	1 Analisis Kebijakan Ahli Muda Pindah Datang dan Penduduk Tetap	
	2 Analisis Kebijakan Ahli Muda Pendataan Penduduk	
	3 Analisis Kebijakan Ahli Muda Kelahiran	
	4 Analisis Kebijakan Ahli Muda Perkawinan dan Perceraian	
	5 Analisis Kebijakan Ahli Muda Perubahan status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian	
	6 Analisis Kebijakan Ahli Muda Pengolahan dan Penyajian Data	
	7 Analisis Kebijakan Ahli Muda Kerjasama dan Inoasi	
6	Staf Fungsional Umum	14 orang
7	Staf Fungsional tertentu	4 orang
8	PPPK	33 orang
	1 Ahli Pertama	
	2 Pelaksana/Terampil	
9	Tenaga Bantu (Naban) Non ASN	10 orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>75 orang</b>

Sumber : Data Simpeg Tahun 2025

Adapun komposisi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.3**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Disdukcapil Kota Balikpapan**

No .	Uraian	Pendidikan	Jumlah Pegawai Tahun 2025	%
1	PNS	SLTP	-	-
		SLTA	11	14,67
		SARJANA MUDA/D3	6	8,00
		DIPLOMA 4	-	-
		SARJANA (SI)	9	12,00
		PASCA SARJANA /S2	6	8,00



No .	Uraian	Pendidikan	Jumlah Pegawai Tahun 2025	%
		<b>JUMLAH</b>	<b>32</b>	<b>42,67</b>
2	PPPK	SLTP	-	-
		SLTA	13	-
		SARJANA MUDA/D3	9	12,00
		DIPLOMA 4	-	-
		SARJANA (SI)	11	14,67
		PASCA SARJANA /S2	-	-
		<b>JUMLAH</b>	<b>33</b>	<b>44,00</b>
3	Non ASN	SLTP	-	-
		SLTA	5	6,67
		DIPLOMA 1/2/3	1	1,33
		DIPLOMA 4	-	-
		SARJANA (SI)	4	5,33
		PASCA SARJANA /S2	-	-
		<b>JUMLAH</b>	<b>10</b>	<b>13,33</b>
		<b>TOTAL JUMLAH PEGAWAI</b>	<b>75</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Data Simpeg Tahun 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Kota Balikpapan menjalankan atau melaksanakan fungsi pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu sebagai berikut:

- A. Kinerja Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, antara lain:
- 1) Pencatatan biodata Penduduk;  
Pencatatan biodata penduduk dilakukan terhadap:
    - WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
    - WNI yang datang dari luar wilayah NKRI karena pindah
    - Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas.
  - 2) Penerbitan Kartu Keluarga (KK);  
Penerbitan KK bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
    - Penerbitan KK baru
    - Penerbitan KK karena perubahan data
    - Penerbitan KK karena hilang atau rusak
  - 3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);  
Penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
    - Penerbitan KTP-el baru
    - Penerbitan KTP-el karena pindah pendatang
    - Penerbitan KTP-el karena perubahan data
    - Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap
    - Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak
    - Penerbitan KTP-el di luar domisili
  - 4) Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);  
Disdukcapil Kota Balikpapan menerbitkan KIA bagi penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.

- 5) Penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap pendaftaran peristiwa kependudukan; dan

Pendaftaran peristiwa perpindahan Penduduk terdiri atas:

- Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah NKRI
- Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi
- Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah NKRI
- Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antar negara

- 6) Pendataan Penduduk rentan administrasi kependudukan.

Pendataan Penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi:

- Penduduk korban bencana alam
- Penduduk korban bencana sosial
- Orang terlantar
- Komunitas terpencil

B. Kinerja Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, antara lain:

- 1) Akta kelahiran

Yang terdiri atas:

- Kelahiran bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan
- Kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya
- Kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah NKRI yang sedang berkunjung di Indonesia
- Kelahiran Orang Asing yang memiliki izin kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap

- 2) Akta lahir mati

- 3) Akta perkawinan

Yang terdiri atas:

- Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah NKRI
- Pencatatan perkawinan Orang Asing di wilayah NKRI
- Perkawinan WNI di luar wilayah NKRI
- Perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar wilayah NKRI

- 4) Akta pembatalan perkawinan

- 5) Akta perceraian

- 6) Akta pembatalan perceraian

- 7) Akta kematian

- 8) Akta pengangkatan anak

- 9) Akta pengakuan anak

- 10) Akta pengesahan anak

- 11) Akta perubahan nama

- 12) Akta perubahan status kewarganegaraan

- 13) Akta peristiwa penting lainnya

- 14) Pambetulan akta; dan

- 15) Pembatalan akta

C. Kinerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, antara lain:

- 1) Terlaksananya pelaporan secara periodik buku profil kependudukan, laporan Penduduk tahunan semester I dan semester II
- 2) Terlaksananya pemutakhiran/validasi dokumen kependudukan
- 3) Terlaksananya tugas pengolahan dan penyajian data kependudukan
- 4) Terlaksananya pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak
- 5) Terlaksananya pengembangan aplikasi guna meningkatkan kualitas pelayanan

- 6) Terlaksananya pengembangan jaringan dalam menunjang kelancaran proses pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

D. Kinerja Pelayanan atas Dukungan Kesekretariat, antara lain:

- 1) Tersedianya Sumber Daya Manusia (DM) yang unggul dan berkompeten pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2) Tersedianya blanko KTP-el dan blanko KIA
- 3) Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) dalam menunjang proses pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil serta pertanggungjawaban keuangan
- 4) Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
- 5) Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas dan kendaraan operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan.

#### **2.1.4 Kelompok sasaran layanan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan selalu meningkatkan kualitas pelayanan yang dihasilkan. Peningkatan kualitas pelayanan yang dihasilkan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat dengan program pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat (nol kilometer nol rupiah).

Untuk mewujudkan tujuan pemberian pelayanan yang membahagian masyarakat, Disdukcapil Kota Balikpapan selalu menciptakan inovasi-inovasi pelayanan guna menunjang kualitas hasil pelayanan yang efektif, efisien, dan transparan. Adapun kelompok sasaran layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)

Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menyasar keseluruhan penduduk WNI yang berada dan tinggal di wilayah NKRI. Adapun pelayanan yang diperoleh/didapatkan oleh WNI adalah seluruh produk pelayanan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan berdasarkan permohonan Penduduk seperti Kartu Keluarga/KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan/Akta Perceraian (bagi WNI yang beragama Non-Islam), dan Surat Pindah/SKPWNI.

2. Warga Negara Asing (WNA)

Selain WNI, pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil juga menyasar ke WNA. WNA yang memperoleh pelayanan adalah WNA yang memiliki izin tinggal tetap dan WNA yang memiliki izin tinggal sementara. Adapun layanan yang diperoleh antara lain:

- KTP WNA
- Pelaporan kelahiran WNA
- Pelaporan perkawinan WNA dengan WNI
- Pelaporan kematian WNA

3. Anak-anak usia 0-17 Tahun

Anak-anak dari usia 0-17 Tahun kurang satu hari juga membutuhkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Adapun layanan yang didapatkan adalah penerbitan NIK dan KK baru, Pencatatan Kelahiran yang dibuktikan dengan penerbitan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA).

4. Remaja dan Dewasa (usia 17 + Tahun)

Kelompok sasaran pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil juga menasar pada remaja atau dewasa yang berusia diatas 17 Tahun. Adapun pelayanan yang dilakukan adalah perekaman dan penerbitan KTP-el pertama kali (pemula).

#### 5. Penduduk Rentan

Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Balikpapan juga menasar pada penduduk rentan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kelompok penduduk rentan tersebut meliputi:

- Korban Bencana Alam
- Korban Bencana Sosial
- Penduduk Terlantar
- Masyarakat terpencil
- Penduduk miskin ekstrem
- Penyandang disabilitas dan ODGJ

Pelayanan yang dilakukan untuk kelompok penduduk rentan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ini dilakukan dengan cara jemput bola, yaitu petugas dari Disdukcapil Kota Balikpapan datang ke kelompok sasaran yang membutuhkan pelayanan. Adapun jenis layanan yang diberikan adalah seluruh pelayanan admindukcapil sesuai dengan kebutuhan dan usia penduduk rentan tersebut.

#### 6. Lanjut Usia (Lansia)

Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil juga ditujukan bagi penduduk yang lanjut usia (lansia). Dalam hal ini biasanya pelayanan yang dilakukan adalah penggantian dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang hilang atau rusak, ataupun yang dipergunakan untuk pemutakhiran data penduduk.

#### 7. Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Pekerja Migran Indonesia (PMI) termasuk dalam kelompok ssaran layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, terutama dalam hal pemenuhan hak atas dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil baik sebelum berangkat ke luar negeri, selama berada di luar negeri, maupun setelah kembali ke Indonesia. Adapun layanan yang relevan bagi PMI ini antara lain:

##### a. Penerbitan dan pemutakhiran data dokumen kependudukan, meliputi :

- Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
- Penerbitan KTP-el sesuai dengan domisili
- Purat pindah keluar negeri (jika menetap dalam jangka panjang)
- Pemutakhiran status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, dll

##### b. Pencatatan sipil, meliputi:

- Akta kelahiran anak PMI yang lahir di luar negeri
- Akta perkawinan campuran
- Akta kematian PMI di luar negeri
- Perubahan status kependudukan setelah kembali dari luar negeri

##### c. Perekaman KTP-el di luar negeri

Perekaman KTP-el di luar negeri dilakukan melalui kerja sama antara Disdukcapil dan Kementerian Luar Negeri/Perwakilan RI di Luar Negeri

##### d. Integrasi data PMI dengan sistem nasional, digunakan untuk keperluan:

- BPJS Ketenagakerjaan
- Bantuan sosial
- Perlindungan Hukum dan HAM di luar Negeri

#### 8. Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di Indonesia

Selain Warga Negara Indonesia, pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil juga menyasar pada Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia. Adapun WNA yang dapat melakukan atau diberikan pelayanan adalah Warga Negara Asing yang memiliki ijin tinggal tetap dan Warga Negara Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas. Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diperoleh antara lain:

- KTP Elektronik WNA
- Pencatatan Perkawinan campuran
- Akta kelahiran anak dan WNA dan WNI
- Akta Kematian WNA di wilayah Indonesia

#### 9. Lembaga/Instansi Vertikal

Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi Lembaga/Instansi Pemerintah dan Non-Pemerintah biasa dilakukan untuk keperluan:

- Validasi data kependudukan
- Pemanfaatan data untuk pelayanan publik lainnya, mislakan BPJS, Bansos, Penerimaan Siswa atau Mahasiswa Baru, dll).

### **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan amanat UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah di bidang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Berdasarkan hal tersebut Disdukcapil Kota Balikpapan memiliki peran yang sangat krusial dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Indonesia, khususnya di Kota Balikpapan sebagai dasar untuk memperoleh hak-hak sipil dan sosial masyarakat.

Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan, Disdukcapil Kota Balikpapan masih menghadapi sejumlah permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan tersebut berkaitan dengan keterbatasan dalam cakupan layanan, akurasi data, serta infrastruktur yang belum merata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Balikpapan. Selain itu, dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, Disdukcapil Kota Balikpapan juga dihadapkan pada isu strategis seperti transformasi digital, perlindungan data pribadi, serta peningkatan aksesibilitas bagi kelompok-kelompok rentan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya strategis yang berkelanjutan untuk menjawab tantangan ini, guna memastikan bahwa layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat berjalan dengan efektif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

#### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan merupakan segala bentuk kendala, hambatan, atau kekurangan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Permasalahan ini dapat bersifat struktural, teknis, sosial, maupun kultural yang dapat berdampak pada efektivitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, validitas data kependudukan, serta pemenuhan hak sipil warga negara atas dokumen identitas

hukum. Mengidentifikasi permasalahan ini menjadi langkah awal untuk merumuskan solusi dan strategi pembangunan kependudukan yang lebih baik.

Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kota Balikpapan secara berkesinambungan, selalu dalam proses pembenahan dan perbaikan. Hal ini dimaksudkan agar kedepannya tercipta pelayanan yang jauh lebih baik sesuai dengan harapan serta kebutuhan masyarakat. Namun dalam upaya penyelenggaraan pelayanan tersebut masih terdapat atau menyisakan adanya pencapaian pelayanan yang belum optimal.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan jaman yang ada pada saat ini, mengharuskan dan memaksa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk membuat inovasi-inovasi yang dapat menunjang dan mendorong kemajuan teknologi dan perkembangan jaman tersebut. Oleh sebab itu Disdukcapil Kota Balikpapan menciptakan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu pelayanan yang berbasis *web*. Dengan diberlakukannya pelayanan secara daring yang berbasis *web* ini, maka seluruh masyarakat harus melakukan pengajuan permohonan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui link <https://capil.balikpapan.go.id>.

Dengan diberlakukannya Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta Permendagri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, maka semakin mempermudah Disdukcapil Kota Balikpapan untuk melaksanakan inovasi-inovasi yang diciptakan, salah satunya yaitu inovasi terkait pelayanan secara daring atau *online*. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa seluruh dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat di cetak secara mandiri dengan menggunakan kertas HVS 80 gram, kecuali KTP elektronik dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Adapun beberapa permasalahan dan hambatan yang menjadi tantangan Disdukcapil Kota Balikpapan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan pokok, masalah, dan akar masalah yang dijelaskan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.4**  
**Pemetaan Permasalahan yang menjadi Tantangan**  
**Disdukcapil Kota Balikpapan**

Masalah Pokok	Masalah	Penyebab masalah /Akar Masalah
Jumlah Penduduk Kota Balikpapan yang terdaftar dalam database kependudukan Kota Balikpapan tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang berdomisili di Kota Balikpapan	Belum tersedianya data penduduk yang akurat sebagai dasar untuk kegiatan perencanaan pembangunan di Kota Balikpapan	Minimalnya sosialisasi terkait pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
		Tingginya mobilitas penduduk pendatang luar daerah yang tidak melaporkan kedatangannya
	Belum optimalnya pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya pada database kependudukan Kota Balikpapan	Ketidak sesuaian antara database kependudukan dengan kondisi nyata penduduk di Kota Balikpapan

Sumber : Data diolah dari kertas kerja Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah permasalahan utama yang bersifat mendasar, berdampak luas, dan membutuhkan perhatian serta penanganan prioritas dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan. Isu-isu ini menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan publik dalam menjamin hak identitas hukum, keakuratan data penduduk, dan keterjangkauan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Atau dapat di tarik kesimpulan Isu Strategis merupakan pokok-pokok persoalan yang harus menjadi fokus kebijakan jangka menengah dan jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, menjamin perlindungan hak warga negara, serta mendukung pembangunan berbasis data yang valid dan mutakhir.

Analisis terkait isu-isustrategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan memberikan hal-hal prioritas dalam pembangunan daerah.

Adapun kriteria dari isu-isu strategis yaitu memiliki pengaruh yang besar terhadap pelayanan publik dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang. Sejalan dengan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah, adanya peluang untuk ditangani dan memiliki daya ungkit untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan, juga faktor penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah kajian terhadap Visi, Misi dan program Kepala Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan berupaya untuk terus menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya setiap individu ataupun keluarga memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang lengkap dan selalu terbaharui sejalan dengan adanya perubahan pada elemen data yang terkandung dalam dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang dimiliki. Hal ini berkaitan dengan validitas dan keakuratan data kependudukan yang dihasilkan dalam pelayanan yang dimohonkan oleh masyarakat yang kedepannya akan digunakan sebagai dasar pelayanan publik lainnya, ataupun sebagai dasar penentuan kebijakan dan arah kebijakan pemerintah daerah.

Berikut isu strategis yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan yang tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.5  
Isu Strategis Disdukcapil Kota Balikpapan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONA L	

(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 .  2 .  3 .	Kolaborasi dan sinergi dengan instansi pemerintah dan non pemerintah yang tersedia pada aplikasi pantai balikpapan	1 .	Minimalnya sosialisasi terkait pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dampak bangkitan dari pembangunan IKN	Demografi, urbanisasi dunia dan perkembangan teknologi	Tata kelola dan stabilitas pemerintahan	Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Jumlah Penduduk Kota Balikpapan yang terdaftar dalam database kependudukan Kota Balikpapan tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang berdomisili di Kota Balikpapan
	Inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	2 .	Ketidak sesuaian antara database kependudukan dengan kondisi nyata penduduk di Kota Balikpapan					
	Dukungan sarana dan prasarana TIK yang memadai (digitalisasi)	3 .	Tingginya mobilitas penduduk pendatang luar daerah yang tidak melaporkan kedatangannya					
		4 .	Belum tersedianya data penduduk yang akurat sebagai dasar untuk kegiatan perencanaan pembangunan di Kota Balikpapan					
		5 .	Belum optimalnya pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya pada database kependudukan Kota Balikpapan					

Sumber : Data diolah dari kertas kerja Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Tujuan adalah rumusan umum mengenai hasil atau kondisi yang ingin dicapai dalam jangka menengah (lima tahunan), yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi organisasi serta mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Dari pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan merupakan arah strategis atau kondisi yang menggambarkan upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, memperkuat



sistem data kependudukan yang valid dan terintegrasi, serta mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang profesional, efektif dan efisien yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 sampai 5 Tahun kedepan.

Kondisi ini harus ada sebagai jembatan untuk mencapai visi dan misi Wali Kota Balikpapan yang sudah ditetapkan dan tertuang pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029. Dengan diformulasikannya tujuan, maka Disdukcapil Kota Balikpapan dapat secara tepat mengetahui langkah yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi Wali Kota Balikpapan tersebut. Adapun Visi Wali Kota Balikpapan yaitu **"Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua dalam Bingkai Madinatul Iman"** dengan Misi pertama yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Disdukcapil Kota Balikpapan yaitu **"Membangun dan Mengembangkan Pemerintah yang Bersih dan Profesional Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat"**.

Adapun tujuan jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan yang sejalan dengan sasaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yakni:

---

***"Meningkatnya Kepuasan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Semakin Prima dan Adaptif Transformasi Digital"***

---

Sasaran merupakan rumusan yang lebih spesifik dan terukur dari tujuan, yang menggambarkan hasil yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dalam jangka menengah (5 tahun). Sasarn menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan, dan indikator kinerja perangkat daerah. Selain itu sasaran berfungsi untuk menerjemahkan tujuan ke dalam hasil nyata yang diharapkan, memberikan arah fokus pelaksanaan program dan kegiatan, dan menjadi acuan dalam pengukuran kinerja capaian pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kriteria penentuan target kinerja sasaran strategis tersebut harus mempertimbangkan beberapa aspek penting, anatara lain:

- 1. *Specific* ; sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas
- 2. *Measurable* ; target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
- 3. *Achievable* ; target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada
- 4. *Relevant* ; mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target *outcome* dalam rangka mencapai target *impact* yang ditetapkan
- 5. *Time Bond* ; waktu dan periode pencapaian kinerja ditetapkan

Adapun Sasaran Renstra Dinnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yakni:

---

***Meningkatnya Kualitas Pelayananan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil***

***Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah***

---

Berdasarkan hal tersebut diatas, serta memperhatikan permasalahan yang terpetakan dan isu-isu strategis yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, maka dirumuskan pula tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Renstra Disdukcapil**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>											
- Pelayanan publik yang semakin prima dan adaptif transformasi digital	Meningkatnya Kepuasan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang semakin prima dan adaptif transformasi digital		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Poin)	93,84	93,89	93,93	94,02	94,21	94,4	94,59	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase permohonan layanan pendaftaran penduduk yang selesai tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan (%)	99,790	99,800	99,807	99,814	99,821	99,828	99,835	
			Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Pencatatan Sipil (%)	97,43	97,47	99,9	99,91	99,92	99,93	99,94	
			Persentase permohonan layanan pencatatan sipil yang selesai tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	73,1	74,44	74,73	75,03	75,41	76,41	76,74	

Sumber : Data diolah dari kertas kerja Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029

### **3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029**

Strategi adalah pendekatan atau cara yang bersifat umum yang akan ditempuh oleh organisasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi juga dapat diartikan dengan langkah yang menggambarkan rangkaian tindakan terpadu yang mencerminkan prioritas Disdukcapil Kota Balikpapan dalam menyelesaikan permasalahan dan isu strategis.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Perangkat Daerah merupakan langkah-langkah yang diambil oleh Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja organisasi Perangkat Daerah, dalam hal ini yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan.

Strategi tersebut berisi atau memuat rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Disdukcapil Kota Balikpapan meliputi pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan dengan upaya meningkatkan capaian standar kepuasan masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Adapun strategi jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2025-2029 terhadap sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang mudah diakses, cepat, transparan dan berbasis digital
- b. Mendorong kolaborasi dan integrasi data kependudukan dengan instansi pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan data base kependudukan secara cepat dan akurat
- c. Meningkatkan pengembangan kapasitas SDM dan kualitas layanan
- d. Meningkatkan jangkauan dan aksesibilitas layanan kepada seluruh lapisan masyarakat
- e. Meningkatkan perlindungan dan keamanan data kependudukan melalui penguatan sistem informasi dan regulasi
- f. Mendorong peningkatan cakupan kepemilikan dokumen dasar kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Meningkatkan penguatan tata kelola dan manajemen kinerja pegawai
- h. Meningkatkan transparansi dan integritas pelayanan publik

**Tabel 3.2**  
**Penahapan Renstra Perangkat Daerah**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengembangan Aplikasi Pelayanan Adminduk Capil	Pengembangan Aplikasi Pelayanan Adminduk Capil	Pengembangan Aplikasi Pelayanan Adminduk Capil	Pengembangan Aplikasi Pelayanan Adminduk Capil	Pengembangan Aplikasi Pelayanan Adminduk Capil
Peningkatan Layanana Adminduk Capil Bekerjasama Dengan OPD terkait dan Instansi Vertikal	Peningkatan Layanana Adminduk Capil Bekerjasama Dengan OPD terkait dan Instansi Vertikal	Peningkatan Layanana Adminduk Capil Bekerjasama Dengan OPD terkait dan Instansi Vertikal	Peningkatan Layanana Adminduk Capil Bekerjasama Dengan OPD terkait dan Instansi Vertikal	Peningkatan Layanana Adminduk Capil Bekerjasama Dengan OPD terkait dan Instansi Vertikal

Sumber: Data diolah dari kertas kerja Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029

**3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029**

Arah kebijakan adalah penjabaran operasional dari strategi yang lebih konkret dan spesifik, menjadi dasar dalam perumusan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam melaksanakan pengembangan program dan kegiatan demi tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Hubungan antara Tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah kebijakan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah ini sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan terdapat kesinambungan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Apabila hubungan diantara komponen tidak berbanding lurus maka dapat dipastikan pokok besar yang menjadi tujuan dari Renstra ini tidak dapat terwujud dengan optimal.

**Tujuan** dirinci menjadi **Sasaran**, **Sasaran** dicapai melalui **Strategi**, **Strategi** dijabarkan menjadi **Arah Kebijakan**, **Arah Kebijakan** dijadikan dasar untuk menyusun **Program dan Kegiatan**. Adapun keterikatan hubungan antar komponen tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Dalam Strategi RPIMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sesuai dengan misi I "Membangun dan Mengembangkan Pemerintah yang Bersih dan Profesional Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat", maka disusunlah strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Arah Kebijakan Renstra**  
**Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

N O	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan pendaftaran penduduk.	Pengembangan SPBE untuk meningkatkan kualitas pelayanan	1. percepatan perekaman/ pencetakkan KTP-el dan KIA SERTA Peningkatan pelayanan jemput bola untuk wilayah terpencil dan kelompok rentan	
2	Pelayanan pencatatan sipil.		2. Peningkatan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara daring dan perluasan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	
3	Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota.		3. Peningkatan kualitas pelayanan melalui penguatan kompetensi SDM dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil guna menciptakan pelayanan yang membahagiakan masyarakat	
	Pengumpulan data kependudukan		4. Peningkatan Pemutakhiran dan validasi data kependudukan melalui pelaporan mandiri dan pepadanan lintas sektor (integrasi data)	
			5. Pengoptimalan penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	
4	Penyusunan profile kependudukan kabupaten/kota.		6. Peningkatan pemanfaatan data kependudukan secara luas dan lintas sektor untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	
			7. Pengembangan aplikasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang mudah dan terintegrasi yang berbasis digital	
			8. Mengembangkan metode pengumpulan dan verifikasi data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan sesuai standar nasional	

Sumber: Data diolah dari kertas kerja Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel diatas, maka arah kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan guna menunjang strategi jangka menengah selama kurun waktu 5 (lima) tahun, antara lain:

- 1) percepatan perekaman/ pencetakan KTP-el dan KIA SERTA Peningkatan pelayanan jemput bola untuk wilayah terpencil dan kelompok rentan
- 2) Peningkatan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara daring dan perluasan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan melalui penguatan kompetensi SDM dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil guna menciptakan pelayanan yang membahagiakan masyarakat
- 4) Peningkatan Pemutakhiran dan validasi data kependudukan melalui pelaporan mandiri dan pepadanan lintas sektor (integrasi data)
- 5) Pengoptimalan penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- 6) Peningkatan pemanfaatan data kependudukan secara luas dan lintas sektor untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah
- 7) Pengembangan aplikasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang mudah dan terintegrasi yang berbasis digital
- 8) Mengembangkan metode pengumpulan dan verifikasi data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan sesuai standar nasional

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA**

#### **PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Merujuk pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sebagai unsur pelaksana Pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yakni tahun 2025-2029, maka Disdukcapil Kota Balikpapan menyusun Program kerja, kegiatan, sub kegiatan atau pendanaan indikatif serta menetapkan indikator kinerja sebagai pedoman Dinas dalam membuat perjanjian kinerja dengan Wali Kota Balikpapan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu fungsi strategis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat serta mendukung terwujudnya tertib administrasi kependudukan. Melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terstruktur, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diarahkan untuk memenuhi hak konstitusional setiap warga negara dalam memperoleh dokumen kependudukan yang sah, serta mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis data kependudukan yang valid dan mutakhir. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan tercapainya standar pelayanan minimal serta mendorong inovasi pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

#### **4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan bidang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selama lima tahun kedepan yang mengacu pada visi dan misi Wali Kota Balikpapan, maka untuk mewujudkan sasaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yakni **“Meningkatnya Kepuasan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Semakin Prima dan Adaptif Transformasi Digital”** Disdukcapil Kota Balikpapan memiliki 5 (lima) program.

Adapun uraian program yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada perencanaan jangka menengah antara lain:

1. Program Pendaftaran Penduduk;
2. Program Pencatatan Sipil;
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan; dan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Uraian Kegiatan merupakan rincian dari kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam kurun waktu lima tahun



(2025-2029), yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan.

Adapun uraian Kegiatan yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pendafaran Penduduk;
3. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
4. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian database Kependudukan;
5. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan;
7. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
8. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
9. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
10. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
11. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
12. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
14. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Uraian subkegiatan merupakan bagian lebih rinci dari kegiatan utama. Subkegiatan ini dijabarkan dalam perencanaan tahunan dan Rencana Kerja. Selain daripada itu sub kegiatan juga dapat diartikan sebagai unit kerja paling spesifik dalam dokumen Renstra yang berisi aktivitas teknis operasional untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan.

Uraian Subkegiatan, indikator, target, dan pagu indikatif yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Disdukcapil Kota Balikpapan**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>							
Pelayanan publik yang semakin prima dan adaptif transformasi digital	Meningkatnya Kepuasan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang semakin prima dan adaptif transformasi digital				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Poin)		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			1. Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan 2. Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Pencatatan Sipil 3. Persentase permohonan layanan pendaftaran penduduk yang selesai tepat waktu 4. Persentase permohonan layanan pencatatan sipil yang selesai tepat waktu		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk		5. Persentase cakupan perekaman dan pencetakan KTP-elektronik 6. Persentase anak usi 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA 7. Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Terlaksananya penerbitan dokumen kependudukan		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya penyelenggaraan pendaftaran penduduk		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil		1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 2. Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-18 tahun 3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Terlaksananya penyelenggaraan peningkatan pencatatan sipil		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan		Persentase OPD yang memanfaatkan Informasi Kependudukan (%)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
				Terlaksananya Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	
				<b>Terlaksananya pengembangan inovasi pelayanan</b>		<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			<b>Meningkatnya kualitas profil kependudukan</b>		<b>Persentase Kelengkapan Profil Kependudukan sesuai standar (%)</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	
				<b>Terlaksananya penyusunan dokumen profil kependudukan</b>		<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	
					Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
			<b>Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah</b>		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
				<b>Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				<b>Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel.</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				<b>Terwujudnya profesionalisme aparatur perangkat daerah</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	






NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				<b>Terwujudnya layanan umum perkantoran perangkat daerah</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				<b>Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				<b>Terwujudnya operasional umum perangkat daerah</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				<b>Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar berfungsi optimal.</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

Sumber: Data diolah dari kertas kerja Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029

- Keterangan :
-  : Program
  -  : Kegiatan
  -  : SubKegiatan

**Tabel 4.2**  
**Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL				20.705.866.000		21.327.042.000		22.393.394.000		22.841.262.000		23.526.500.000		
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18.230.048.875		18.560.597.875		19.815.056.175		20.225.329.655		20.926.663.683		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	87,82	87,94	18.230.048.875	88	18.560.597.875	88,05	19.815.056.175	88,1	20.225.329.655	88,15	20.926.663.683		
2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				36.181.800		39.799.980		43.779.978		48.157.975		52.793.773		
Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	36.181.800	5	39.799.980	5	43.779.978	5	48.157.975	5	52.793.773		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				36.181.800		39.799.980		43.779.978		48.157.975		52.793.773		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	36.181.800	5	39.799.980	5	43.779.978	5	48.157.975	5	52.793.773		
2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.120.363.590		10.729.542.160		11.051.428.425		11.382.971.277		11.724.460.415		
Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bula n)	602	910	10.120.363.590	910	10.729.542.160	910	11.051.428.425	910	11.382.971.277	910	11.724.460.415		
2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.120.363.590		10.729.542.160		11.051.428.425		11.382.971.277		11.724.460.415		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bula n)	602	910	10.120.363.590	910	10.729.542.160	910	11.051.428.425	910	11.382.971.277	910	11.724.460.415		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.480.192.500		1.802.450.500		1.652.450.500		1.802.450.500		1.652.450.500		
Terwujudnya profesionalisme aparatur perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	1.480.192.500	5	1.802.450.500	5	1.652.450.500	5	1.802.450.500	5	1.652.450.500		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1		1		0		1		0			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	0	300		400		400		400		400			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementas i Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	82	81		69		69		69		69			
2.12.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				70.762.500		150.000.000		0		150.000.000		0		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	70.762.500	1	150.000.000	0	0	1	150.000.000	0	0		
2.12.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000		
2.12.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				268.930.000		438.450.500		438.450.500		438.450.500		438.450.500		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	300	268.930.000	400	438.450.500	400	438.450.500	400	438.450.500	400	438.450.500		
2.12.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1.140.500.000		1.114.000.000		1.114.000.000		1.114.000.000		1.114.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	82	81	1.140.500.000	69	1.114.000.000	69	1.114.000.000	69	1.114.000.000	69	1.114.000.000		
2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.161.671.328		3.803.401.087		4.041.649.578		4.327.432.340		4.982.641.432		
Terwujudnya layanan umum perkantoran perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	3	4.161.671.328	0	3.803.401.087	3	4.041.649.578	0	4.327.432.340	3	4.982.641.432		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3,764	0		0		160		160		0			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka n Kantor yang Disediakan (Paket)	10	6		6		6		6		6			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8	6		6		6		6		6			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan (Paket)	4	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.025.994.128		1.025.994.128		1.025.994.128		1.025.994.128		1.025.994.128		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan (Paket)	10	6	1.025.994.128	6	1.025.994.128	6	1.025.994.128	6	1.025.994.128	6	1.025.994.128		
2.12.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				90.949.882		0		90.777.380		0		90.777.380		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	3	90.949.882	0	0	3	90.777.380	0	0	3	90.777.380		
2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2.410.625.079		2.081.967.346		2.081.967.346		2.324.809.266		2.944.240.978		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8	6	2.410.625.079	6	2.081.967.346	6	2.081.967.346	6	2.324.809.266	6	2.944.240.978		
2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				46.043.339		50.647.673		55.712.440		61.283.684		61.283.684		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	2	46.043.339	2	50.647.673	2	55.712.440	2	61.283.684	2	61.283.684		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				20.728.500		20.728.500		20.728.500		20.728.500		20.728.500		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	20.728.500	1	20.728.500	1	20.728.500	1	20.728.500	1	20.728.500		
2.12.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				67.330.400		74.063.440		81.469.784		89.616.762		89.616.762		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	1	67.330.400	1	74.063.440	1	81.469.784	1	89.616.762	1	89.616.762		
2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500.000.000		550.000.000		605.000.000		720.000.000		750.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	500.000.000	12	550.000.000	12	605.000.000	12	720.000.000	12	750.000.000		
2.12.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		80.000.000		85.000.000		0		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3,764	0	0	0	0	160	80.000.000	160	85.000.000	0	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				898.150.000		474.400.000		1.154.700.000		561.840.000		411.840.000		
Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	898.150.000	1	474.400.000	73	1.154.700.000	1	561.840.000	0	411.840.000		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	5		4		4		4		4			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		1		0		0			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		1		0		0			
2.12.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		600.000.000		0		0		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	1	600.000.000	0	0	0	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				898.150.000		374.400.000		374.400.000		411.840.000		411.840.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	5	898.150.000	4	374.400.000	4	374.400.000	4	411.840.000	4	411.840.000		
2.12.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		100.000.000		80.300.000		150.000.000		0		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	100.000.000	73	80.300.000	1	150.000.000	0	0		
2.12.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		100.000.000		0		0		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0		
2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				767.664.757		852.068.763		898.165.726		977.705.810		977.705.810		
Terwujudnya operasional umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	1	767.664.757	1	852.068.763	1	898.165.726	1	977.705.810	1	977.705.810		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				54.000.000		81.440.000		81.440.000		81.440.000		81.440.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2	54.000.000	2	81.440.000	2	81.440.000	2	81.440.000	2	81.440.000		
2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				417.230.112		418.031.153		460.568.116		504.848.436		504.848.436		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	417.230.112	12	418.031.153	12	460.568.116	12	504.848.436	12	504.848.436		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				296.434.645		352.597.610		356.157.610		391.417.374		391.417.374		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	1	296.434.645	1	352.597.610	1	356.157.610	1	391.417.374	1	391.417.374		
2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				765.824.900		858.935.385		972.881.968		1.124.771.753		1.124.771.753		
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar berfungsi optimal.	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	36	765.824.900	0	858.935.385	0	972.881.968	0	1.124.771.753	0	1.124.771.753		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	26	21		21		21		21		21			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25	28		28		29		29		29			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				660.559.900		759.643.885		873.590.468		1.004.629.038		1.004.629.038		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25	28	660.559.900	28	759.643.885	29	873.590.468	29	1.004.629.038	29	1.004.629.038		
2.12.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				15.000.000		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	36	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				90.265.000		99.291.500		99.291.500		120.142.715		120.142.715		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	26	21	90.265.000	21	99.291.500	21	99.291.500	21	120.142.715	21	120.142.715		
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				1.815.735.000		1.658.900.000		1.513.900.500		1.513.900.500		1.513.900.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBPROGRAM / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase anak usi 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (%)	99,42	99,47	1.815.735.000	99,49	1.658.900.000	99,51	1.513.900.500	99,53	1.513.900.500	99,55	1.513.900.500	2.12.0.00.0.0 0.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Persentase cakupan perekaman dan pencetakan KTP-elektronik (%)	99,950	99,952		99,953		99,954		99,955		99,956			
	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	5,18	17,5		20		22,5		25		30			
2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1.815.735.000		1.333.350.000		1.313.900.500		1.313.900.500		1.313.900.500		
Terlaksananya penerbitan dokumen kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	250.000	250.000	1.815.735.000	0	1.333.350.000	0	1.313.900.500	0	1.313.900.500	0	1.313.900.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependuduk an (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				621.280.000		0		0		0		0		
Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependuduk an (Dokumen)	250.000	250.000	621.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.12.02.2.01.0007 - Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				1.194.455.000		1.333.350.000		1.313.900.500		1.313.900.500		1.313.900.500		
Terlaksananya Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependuduk an (Laporan)	1	1	1.194.455.000	1	1.333.350.000	1	1.313.900.500	1	1.313.900.500	1	1.313.900.500		
2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				0		325.550.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	4	4	0	4	325.550.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000		
2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				0		325.550.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	4	4	0	4	325.550.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000		
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				117.420.000		435.920.000		440.000.000		474.500.000		455.000.000		
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	117.420.000	100	435.920.000	100	440.000.000	100	474.500.000	100	455.000.000	2.12.0.00.0.0 0.01.0000 - DINAS KEPENDUDU KAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0- 18 tahun (%)	99,77	99,79		99,81		99,83		99,85		99,87			
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	95,09	100		100		100		100		100			
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Melaporkan (Persentase)													
2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				117.420.000		435.920.000		440.000.000		474.500.000		455.000.000		
Terlaksananya penyelenggaraan peningkatan pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	0	1	117.420.000	1	435.920.000	1	440.000.000	1	474.500.000	1	455.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelengga rakan Urusan Pemerintaha n di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing- Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota (Laporan)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.03.2.02.0002 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota				17.420.000		30.000.000		30.000.000		64.500.000		45.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1	17.420.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	64.500.000	1	45.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.03.2.02.0006 - Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil				100.000.000		405.920.000		410.000.000		410.000.000		410.000.000		
Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	0	1	100.000.000	1	405.920.000	1	410.000.000	1	410.000.000	1	410.000.000		
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				518.492.125		643.492.125		593.492.125		593.492.125		593.492.125		
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase OPD yang memanfaatk an Informasi Kependuduk an (%)	0	82,61	518.492.125	86,96	643.492.125	91,3	593.492.125	95,65	593.492.125	100	593.492.125	2.12.0.00.0.0 0.01.0000 - DINAS KEPENDUDU KAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				0		125.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Terlaksananya Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependuduk an (Dokumen)	6	19	0	20	125.000.000	21	75.000.000	22	75.000.000	23	75.000.000		
2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				0		125.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	6	19	0	20	125.000.000	21	75.000.000	22	75.000.000	23	75.000.000		
2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				518.492.125		518.492.125		518.492.125		518.492.125		518.492.125		
Terlaksananya pengembangan inovasi pelayanan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	3	1	518.492.125	1	518.492.125	1	518.492.125	1	518.492.125	1	518.492.125		
2.12.04.2.03.0003 - Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				518.492.125		518.492.125		518.492.125		518.492.125		518.492.125		
Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	3	1	518.492.125	1	518.492.125	1	518.492.125	1	518.492.125	1	518.492.125		
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				24.170.000		28.132.000		30.945.200		34.039.720		37.443.692		
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Persentase Kelengkapan Profil Kependudukan sesuai standar (%)	0	100	24.170.000	100	28.132.000	100	30.945.200	100	34.039.720	100	37.443.692	2.12.0.00.0.0 0.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan				24.170.000		28.132.000		30.945.200		34.039.720		37.443.692		
Terlaksananya penyusunan dokumen profil kependudukan	Jumlah Data Kependuduk an Kabupaten/ Kota (Dokumen)	0	2	24.170.000	2	28.132.000	2	30.945.200	2	34.039.720	2	37.443.692		
2.12.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota				24.170.000		28.132.000		30.945.200		34.039.720		37.443.692		
Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependuduk an Kabupaten/ Kota (Dokumen)	0	2	24.170.000	2	28.132.000	2	30.945.200	2	34.039.720	2	37.443.692		

Sumber: Data diolah dari kertas kerja Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029

4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan Daerah memuat penjelasam rinci tentang aktivitas-aktivitas spesifik yang dilakukan untuk mencapai sasaran program daerah yang sesuai dengan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029. Program prioritas mencakup program unggulan yang sejalan dengan visi dan misi Wali Kota serta Wakil Wali Kota terpilih. Program unggulan yang tercantum pada dokumen RPJMD Kota Balikpapan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu **"Penguatan Pemerintahan Digital Terintegrasi"**.

Adapun subkegiatan yang terdapat pada dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dalam rangka mendukung program prioritas yang masuk dalam program unggulan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3  
Uraian Subkegiatan yang Menunjang Program Prioritas Pembangunan Daerah Disdukcapil Kota Balikpapan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1.	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
			2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	
			2.12.02.2.01.0007 - Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
			2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
			2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	
2.	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.12.03.2.02.0002 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	
			2.12.03.2.02.0006 - Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	
3.	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
			2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	
			2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			2.12.04.2.03.0003 - Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
4.	2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan	
			2.12.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	

Sumber: Data diolah dari kertas kerja Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029

**4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah indikator yang menunjukkan hasil utama yang harus dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sebagai wujud dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan. IKU ini digunakan sebagai alat untuk mengukur pencapaian dari tujuan strategis yang telah ditetapkan serta sebagai dasar penilaian kinerja Disdukcapil Kota Balikpapan secara keseluruhan.

Adapun target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4**  
**Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran melalui IKU**  
**Disdukcapil Kota Balikpapan**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Poin	93,84	93,89	93,93	94,02	94,21	94,4	94,59	
2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,10	74,44	74,73	75,03	75,41	76,41	76,74	
3.	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Pencatatan Sipil	%	97,43	97,47	99,9	99,91	99,92	99,93	99,94	
4.	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	99,790	99,800	99,807	99,814	99,821	99,828	99,835	
5.	Persentase permohonan layanan pendaftaran penduduk yang selesai tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6.	Persentase permohonan layanan pencatatan sipil yang selesai tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Sumber: Data diolah dari kertas kerja Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029

**4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keluaran (*output*) dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dalam rangka mencapai sasaran program dan IKU. Indikator Kinerja Kunci ini lebih bersifat operasional dan terperinci. Selain itu Indikator Kinerja Kunci (IKK) juga digunakan untuk memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan secara rutin.

Adapun target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.5**  
**Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui IKK**  
**Disdukcapil Kota Balikpapan**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	positif	Poin	93,84	93,89	93,93	94,02	94,21	94,4	94,59	Tujuan
2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	positif	Nilai	73,1	74,44	74,73	75,03	75,41	76,41	76,74	Sasaran
3.	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	positif	%	99,790	99,800	99,807	99,814	99,821	99,828	99,835	Sasaran
4.	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Pencatatan Sipil	positif	%	97,43	97,47	99,9	99,91	99,92	99,93	99,94	Sasaran
5.	Persentase permohonan layanan pendaftaran penduduk yang selesai tepat waktu	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	Sasaran
6.	Persentase permohonan layanan pencatatan sipil yang selesai tepat waktu	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	Sasaran
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	positif	Nilai	87,82	87,89	87,94	88	88,05	88,1	88,15	Program
8.	Persentase Kelengkapan Profil Kependudukan sesuai standar	positif	%	0	100	100	100	100	100	100	Program
9.	Persentase OPD yang memanfaatkan Informasi Kependudukan	positif	%	0	13,04	82,61	86,96	91,3	95,65	100	Program, LPPD
10.	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	positif	Persentase	95,09	95,15	100	100	100	100	100	Program
11.	Persentase cakupan perekaman dan pencetakan KTP-elektronik	positif	%	99,950	99,951	99,952	99,953	99,954	99,955	99,956	Program, LPPD
12.	Persentase anak usi 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	positif	%	99,42	99,45	99,47	99,49	99,51	99,53	99,55	Program, LPPD
13.	Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-18 tahun	positif	%	99,77	99,78	99,79	99,81	99,83	99,85	99,87	Program, LPPD

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
14.	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	positif	%	5,18	15	17,5	20	22,5	25	30	Program
15.	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Program
16.	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Program
17.	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	positif	Persentase	99,900	99,955	99,957	99,959	99,96	99,962	99,965	SDG's
18.	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	positif	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	SDG's
19.	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	positif	%	99,710	99,941	99,945	99,947	99,95	99,953	99,955	SDG's

Sumber: Data diolah dari kertas kerja Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Balikpapan memiliki peran strategis dalam menjamin terpenuhinya hak administrasi kependudukan seluruh lapisan masyarakat, baik WNI maupun WNA. Pelayanan dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok sasaran, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, lansia, penduduk rentan, hingga pekerja migran. Upaya peningkatan kualitas layanan dilakukan melalui inovasi pelayanan berbasis digital, jemput bola, integrasi data lintas sektor, dan penerapan standar pelayanan minimal.

Meskipun terdapat kemajuan, Disdukcapil masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan cakupan layanan, akurasi data, mobilitas penduduk yang tinggi, serta kebutuhan transformasi digital yang lebih optimal. Strategi lima tahun ke depan (2025–2029) difokuskan pada percepatan pelayanan, peningkatan kompetensi SDM, perluasan aksesibilitas, pemutakhiran data, perlindungan data pribadi, serta pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Dengan arah kebijakan yang jelas dan program yang terstruktur, diharapkan tercipta pelayanan administrasi kependudukan yang prima, inklusif, adaptif terhadap transformasi digital, dan membahagiakan masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 disusun untuk mendukung **visi daerah** “Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua dalam Bingkai Madinatul Iman” dengan **misi** “Membangun dan Mengembangkan Pemerintah yang Bersih dan Profesional Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat”.

Tujuan utama Renstra ini adalah meningkatkan kepuasan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang prima serta adaptif terhadap transformasi digital. Tujuan tersebut dijabarkan menjadi sasaran yang lebih spesifik, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Strategi yang ditempuh mencakup pengembangan sistem pelayanan berbasis digital yang mudah diakses, peningkatan kolaborasi dan integrasi data lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM, perluasan jangkauan layanan, perlindungan data kependudukan, peningkatan kepemilikan dokumen dasar, penguatan tata kelola, serta peningkatan transparansi dan integritas pelayanan publik.

Arah kebijakan yang menjadi pedoman operasional meliputi percepatan perekaman dan pencetakan KTP-el dan KIA, peningkatan pelayanan jemput bola, penguatan kompetensi SDM, pemutakhiran dan validasi data, optimalisasi standar pelayanan publik, pemanfaatan data lintas sektor untuk perencanaan pembangunan, pengembangan aplikasi layanan digital yang terintegrasi, serta pengumpulan dan verifikasi data yang akurat dan sesuai standar nasional.

Dengan strategi dan arah kebijakan tersebut, diharapkan pelayanan Disdukcapil Kota Balikpapan lima tahun ke depan akan semakin prima, inklusif, transparan, adaptif terhadap teknologi, dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada periode 2025–2029 menetapkan program, kegiatan, subkegiatan, dan indikator kinerja sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Perencanaan ini disusun selaras dengan visi dan misi Wali Kota Balikpapan serta **sasaran RPJMD**, yaitu “Meningkatnya Kepuasan Layanan

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Semakin Prima dan Adaptif Transformasi Digital”.

Untuk mencapainya, Disdukcapil kota Balikpapan melaksanakan lima program utama antara lain:

1. Program pendaftaran penduduk
2. Program pencatatan sipil
3. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
4. Program pengelolaan profil kependudukan, dan
5. Program penunjang urusan pemerintah daerah.

Dari 5 (lima) Program tersebut diuraikan menjadi 15 kegiatan strategis yang meliputi layanan inti, pengelolaan data, perencanaan dan evaluasi, administrasi, hingga pengadaan sarana penunjang. Lebih lanjut, kegiatan tersebut dijabarkan ke dalam subkegiatan yang bersifat teknis-operasional, disertai indikator kinerja, target capaian, dan pagu indikatif. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap langkah pelaksanaan terukur, relevan, dan selaras dengan tujuan strategis, sekaligus memungkinkan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

Dengan perencanaan terstruktur ini, diharapkan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Balikpapan semakin terpadu, transparan, cepat, akurat, dan mampu memenuhi hak konstitusional masyarakat.



## M. DINAS PERHUBUNGAN

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Balikpapan mempunyai fungsi antara lain adalah merumuskan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan, melaksanakan tugas teknis di Bidang Perhubungan, melaksanakan tugas teknis operasional bidang perhubungan yang meliputi teknis lalu lintas dan parkir, teknis angkutan dan terminal, teknis sarana dan teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan tugas dan fungsi diatas perlu disusun dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini memuat suatu dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan dan sasaran yang jelas disertai arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk pencapaiannya.

Proses penyusunan Rencana Strategis ini telah melalui beberapa tahapan mulai dari penyusunan rancangan tentang Pembentukan Tim

Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah, dilanjutkan dengan orientasi mengenai Rencana Strategis Perangkat Daerah, kemudian menyusun agenda kerja tim penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan terakhir penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Tim penyusun dipersiapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Adapun susunan tim penyusun terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan sebagai Ketua Tim, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Balikpapan sebagai Sekretaris Tim, Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan, Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Jaringan Transportasi, Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana Sarana Lalu Lintas dan PJU, Kepala Seksi Data Informasi dan Sistem Kontrol Kawasan Lalu Lintas, Kepala Bidang Angkutan, Kepala Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus, Kepala Seksi Angkutan Orang, Kepala Seksi Pengendalian Operasional, Kepala Bidang Perairan dan Udara, Kepala Seksi Angkutan Laut Sungai Danau dan Penyeberangan, Kepala Seksi Kepelabuhanan & Kebandarudaraan sebagai Anggota Penyusun, Kepala UPTD. dan Kepala Sub Tata Usaha Pengujian Kendaraan Bermotor, Kepala UPTD. dan Kepala Sub Tata Usaha Pengelola Parkir, Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai Anggota Penyusun serta staf perwakilan dari bidang, seksi dan UPTD sebagai Anggota Pengumpul Data dan Pengetikan.

Orientasi mengenai Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Balikpapan kepada seluruh anggota tim dilakukan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman yang diperlukan dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. Adapun aspek-aspek orientasi meliputi : peraturan perundang-undangan perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang meliputi tentang keuangan negara, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan

antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggara pemerintah daerah, keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dan teknis menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Agenda kerja dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari pembentukan tim hingga penetapan rancangan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. Adapun agenda tersebut meliputi ; persiapan penyusunan Rencana Strategis, penyusunan rancangan Rencana Strategis, penyesuaian rancangan Rencana Strategis, penyampaian rancangan Rencana Strategis, verifikasi rancangan Rencana Strategis, penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis dan diakhiri dengan penetapan Rencana Strategis.

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Balikpapan perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Adapun data dan informasi yang harus disiapkan antara lain : Peraturan Perundang-undangan yang terkait, dokumen-dokumen seperti RTRW Kota Balikpapan, Renstra Kementerian Perhubungan serta Rencana Strategis Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Timur, hasil evaluasi Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Balikpapan periode lalu.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka ke beradaan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Balikpapan merupakan suatu bagian yang utuh dari manajemen kerja dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Balikpapan setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Balikpapan disusun melalui dasar :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembar negara RI Tahun 1953 No.9) sebagai Undang-Undang (lembar Negara RI nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025 – 2045;
4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 Tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005–2025;
  21. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
  22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana tata Ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 – 2036;
  23. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012–2032;
  24. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PJPD) Tahun 2025-2045;
  25. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  26. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
  27. Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-279/2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur pelaksanaan strategis pembangunan Dinas Perhubungan

Kota Balikpapan untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, antara lain :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2025-2029 dapat tercapai;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan;
4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
5. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yaitu untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Kota Balikpapan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

### 1.4 Sistematika Penulisan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Balikpapan 2025-2029 dibuat dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB IPENDAHULUAN**

##### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Strategis Perangkat Daerah, fungsi Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, keterkaitan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Provinsi, dan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan



Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Balikpapan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Rencana Strategis Dinas Perhubungan. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah:

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

#### 2.1 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia.

#### 2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perhubungan Kota Balikpapan periode sebelumnya, menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dan/atau indikator lainnya seperti SDGs (Sustainable Development Goals) atau indikator yang telah diratifikasi.

#### 2.3 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Rencana Strategis Kementerian Perhubungan dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Timur, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macampelayanan dan arahan lokasi pengembaangan pelayanan yang dibutuhkan.

#### 2.4 Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Tujuan dan sasaran Jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Balikpapan beserta indikator kinerjanya. Strategis dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dalam lima tahun mendatang.

#### 3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yang terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.

### 3.2 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan dan Rencana Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Perhubungan atau Rencana Strategis Dinas Perhubungan propinsi Kalimantan Timur.

### 3.3 Telaahan Rencana Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.

## **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif).

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang

akan dicapai Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan dan beberapa rekomendasi.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN**

#### **2.1. Sumber Daya Dinas Perhubungan.**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Balikpapan mempunyai fungsi antara lain adalah merumuskan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan, melaksanakan tugas teknis di Bidang Perhubungan, melaksanakan tugas teknis operasional bidang perhubungan yang meliputi teknis lalu lintas dan parkir, teknis angkutan dan terminal, teknis sarana dan teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ;

##### **a. Tugas**

Dinas Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan dan tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan.

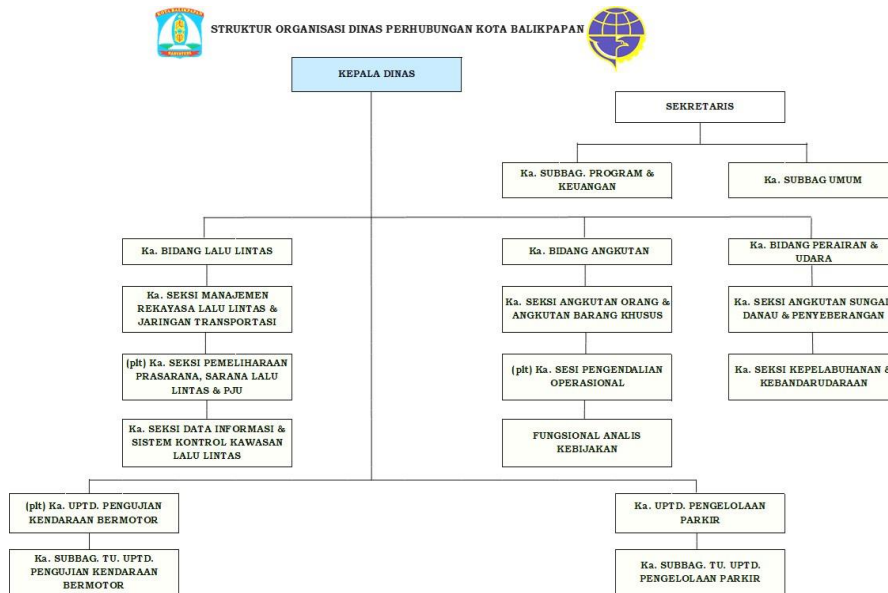
##### **b. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan urusan perhubungan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis urusan perhubungan;
- 3) Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan serta pemantauan dan analisa kelayakan sarana prasarana urusan perhubungan;
- 4) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan urusan perhubungan;
- 5) Pelaksanaan penyusunan regulasi, tatakelola, pengendalian, pengawasan pemberian layanan per izinan dan/ atau rekomendasi perizinan urusan perhubungan;

- 6) Pemberian saran teknis, rekomendasi teknis untuk proses penerbitan perizinan dan non perizinan bidang perhubungan yang pelayanannya telah dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
- 7) Pengelolaan manajemen bidang perhubungan;
- 8) Pembinaan teknis bidang perhubungan;
- 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan



Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi  
Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2025

d. Sumber Daya Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat, 3 (tiga) Bidang dan 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Jumlah PNS Dinas Perhubungan Kota Balikpapan sebanyak 201 (dua ratus satu) orang per Desember 2024 yang terdiri dari:

*Tabel 2.1.1 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan*

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-laki	Perempuan	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
Kepala Dinas	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sekretaris	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kepala Bidang (Plt)	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Kepala Seksi/Ka. UPTD/ Ka. Sub. Bag.	7	2	-	9	-	-	1	8	-	-	-	-
Ka. Sub. Bag. Tata Usaha UPTD (Plt)	2	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-
Pejabat Fungsional	8	-	-	5	3	-	-	1	1	5	-	-
PNS Non Struktural	79	11	-	28	59	3	-	2	9	74	3	2
PNS	101	12	4	44	62	3	3	16	10	79	3	2
Non PNS	64	24	-	-	-	-	-	11	4	65	7	1
PNS + Non PNS	165	36	4	44	62	3	3	27	14	144	10	3
Jumlah	165	36	4	44	62	3	3	27	14	144	10	3

## 2.2. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.

Indikator Kinerja Utama secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan dan sasaran. Suatu Indikator Kinerja Utama dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian Indikator Kinerja Utama Daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Uraian rincian tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, beserta targetnya dapat disajikan sebagai berikut ;

*Tabel 2.2.1 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan*

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Proyeksi Tahun	Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Perhubungan.			77.84	78.08	78.32	78.56						Indikator Tujuan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Proyeksi Tahun	Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025	
2			VC Ratio di Jalan Kota.	0.64	0.64	0.64	0.63						IKK OUTCOME (Indikator Sasaran)
3	Persentase sarana dan prasarana kederماغaan yang dikelola.			0.57	0.57	0.59	0.63						Indikator Sasaran
4	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.			76.79	76.79	77.25	78.75						Indikator Sasaran
5	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.			N/A	27,00	28,75	30,50						Indikator Sasaran
6	Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi.			0.83	0.85	0.87	0.89						Indikator Program
7	Persentase load faktor angkutan orang umum.			0.42	0.42	0.47	0.52						Indikator Program
8		Persentase penggunaan moda transportasi umum di perkotaan.		0.03	4,2%	4,4%	4,8%						Indikator SDGs Indikator Nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran Perpres).
9		Jumlah dermaga penyeberangan.		1	1	1	1						Indikator SDGs Indikator Nasional sebagai proksi indikator global (ada di



No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Proyeksi Tahun	Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025	
													dalam lampiran Perpres).
10		Jumlah pelabuhan strategis.		4	4	4	4						Indikator SDGs Indikator Nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
11			Rasio konektivitas kabupaten/kota.	0.54	0.62	0.62	0.62						IKK OUTCOME
12			Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C.	0.33	0.35	0.4	0.45						IKK OUTPUT (Indikator kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe-C)
13			Terlaksananya pelayanan uji berkala.	13000	15500	16000	16500						IKK OUTPUT
14			Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi.	0	0	0.01	0						IKK OUTPUT (Penetapan tarif angkutan orang dalam kota)

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Proyeksi Tahun	Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025	
15			Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota.	0.4	0.41	0.42	0.43						IKK OUTPUT (Indikator Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota)

### 2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.

Dalam hal pengembangan wilayah, sektor perhubungan berperan dalam mendukung mobilitas pergerakan orang dan/atau barang baik dalam wilayah maupun antar wilayah. Pergerakan orang dan/atau barang tersebut merupakan wujud dari interaksi antar masyarakat, baik selaku pribadi maupun kelompok/golongan. Untuk mendukung mobilitas orang/barang harus difasilitasi dengan adanya ketersediaan layanan angkutan umum yang memadai baik untuk orang dan/atau barang.

Dalam konteks pembangunan di wilayah Kota Balikpapan, transportasi direncanakan tidak hanya sekedar mendukung pembangunan di Kota Balikpapan tetapi harus mampu menjadi bagian dari arah pembangunan di Kota Balikpapan, yang mengedepankan sektor wisata, pendidikan dan ekonomi. Artinya transportasi harus menjadi bagian dari wisata, pendidikan dan ekonomi.

#### 2.3.1. Tantangan

##### a. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor.

Kenaikan penjualan kendaraan bermotor berdampak pada kepemilikan kendaraan yang memicu tingginya lalu lintas, hal ini berdampak pada kepadatan lalu lintas di jaringan jalan yang berada di wilayah Kota Balikpapan, mengingat jumlah pertumbuhan jalan di Kota Balikpapan tidak seimbang dengan

pertumbuhan jumlah kendaraan. Hal ini menyebabkan penerapan manajemen lalu lintas yang menjadi kurang optimal karena tingginya pertumbuhan kendaraan yang tidak linier dengan pertumbuhan ruas jalan. Opsi penambahan atau pelebaran jalan juga sulit karena masalah pembiayaan yang tinggi, serta justru akan menjadikan pertumbuhan kendaraan pribadi semakin tinggi. Di sisi lain, penyediaan angkutan umum bersubsidi di perkotaan Balikpapan juga akan terkendala efek kemacetan yang terjadi karena pola angkutan perkotaan Balikpapan yang masih bercampur, yang berakibat pada penurunan kinerja angkutan umum.



*Gambar 2.3.1 Pengaturan Lalu Lintas di Simpang*

b. Meningkatnya angkutan orang yang ilegal.

Sejak tahun 2014, angkutan umum ilegal yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, semakin marak. Beberapa di antaranya adalah angkutan ojek dan taksi berbasis online. Untuk mengantisipasi peningkatan angkutan ilegal tersebut maka perlu adanya regulasi yang mengatur sebagai dasar dalam pengaturan, serta adanya penertiban dan penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan orang yang ilegal.

c. Parkir pada Badan Jalan (*OnStreet Parking*)

Fenomena meningkatnya penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir juga terjadi khususnya di ruas-ruas jalan di Kawasan Perkotaan Balikpapan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal berikut ini.

- 1) Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang secara langsung berdampak pada tingginya kebutuhan lokasi parkir.
- 2) Tumbuhnya titik-titik pusat kegiatan baru yang berakibat pada pertumbuhan permintaan perjalanan dan permintaan parkir.
- 3) Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam penyediaan *off street parking* sesuai dengan aturan dampak lalu lintas, khususnya pada lokasi-lokasi kegiatan yang berpotensi menarik perjalanan.

Dari aspek permasalahan perparkiran ini, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan telah berupaya menyediakan lokasi parkir di luar badan jalan (*off street parking*), untuk menambah lokasi-lokasi Tempat Khusus Parkir (TKP) yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota. Salah satu Tempat Khusus Parkir (TKP) yang telah dibangun adalah Gedung Klandasan, yang berada di Jalan Jendral Sudirman, yang berfungsi menampung parkir limpahan dari area Kawasan Pasar Klandasan dan Pertokoan Cemara Rindang Klandasan, sekaligus mendukung rencana pedestrianisasi. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyediaan titik-titik parkir baru adalah aspek sosial kemasyarakatan, misalnya adanya resistensi juru parkir.

- 4) Penyelesaian permasalahan transportasi di Kota Balikpapan pada saat ini cenderung masih bersifat parsial dan belum tepat sasaran. Hal tersebut dipertegas dengan belum adanya konsep perencanaan dan implementasi

penyelesaian permasalahan transportasi yang komprehensif serta memiliki *legal standing* yang tegas dan mengikat. Perlu adanya suatu Rencana Induk Transportasi yang menjembatani berbagai permasalahan transportasi baik secara makro maupun mikro yang dinaungi oleh satu Peraturan Daerah di Kota Balikpapan yang tegas dan mengikat.



*Gambar 2.3.2. Penertiban Parkir di Wilayah Kota Balikpapan  
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025*

#### 2.3.2. Peluang

- 1) Kewenangan penataan transportasi dalam rangka Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.  
;
- 2) Keberadaan Depo Kontainer, Perparkiran, Kawasan Pergudangan dan Fasilitas PKB;
- 3) Penetapan jaringan trayek angkutan jalan.

Sarana transportasi umum pada jalan di Kota Balikpapan dikelompokkan menjadi Angkutan umum perkotaan dan angkutan umum reguler. Angkutan umum perkotaan terdiri dari angkutan bus dengan sistem *Buy The Service* (Trans Balikpapan) dan angkutan perkotaan reguler yang melayani Kawasan

Perkotaan Balikpapan. Pada tahun 2024 angkutan Umum Perkotaan dengan sistem Buy The Service melayani 3 jalur dengan 19 armada, angkutan perkotaan reguler terdapat 7 trayek, Bus Sekolah sebanyak 3 unit dan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) 1 jalur yang dikelola Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.



*Gambar 2.3.3. Bus Bacitra (Sarana Angkutan Umum Massal yang melayani Kota Balikpapan)*

*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025*

*Tabel 2.3.1. Jumlah Angkutan Perkotaan Berdasarkan Izin Trayek (unit)*

No	Nama Perusahaan	2021	2022	2023	2024	2025 (Jan-Ags)
1	PT. PAPIN KARYA BERSAMA	92	80	20	143	53
2	PT. LANCAR JAYA SAKTI	48	43	11	70	26
3	PT. KHARISMA ALAM RAYA	7	8	3	11	6

4	PT. FITRIZA MULIA	6	3	2	8	3
5	PRIMKOPBARI	62	54	15	77	28
6	KUD AKBAR	80	53	18	104	43
7	KUAU SETIA BHAKTI	47	44	16	51	25
8	KAUM DHARMAGA	6	5	5	10	2
9	CV. TRANS KARYA	28	19	9	41	15
10	CV. SAMPURNA JAYA	19	13	5	26	9
11	CV. JAGAT RAYA UTAMA	41	35	12	57	26
12	CV. BATAKAN JAYA	36	32	13	63	23
TOTAL		472	389	129	661	259

#### 2.4. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi.

Isu-isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dapat mencakup berbagai aspek terkait lalu lintas, transportasi, dan infrastruktur. Isu-isu ini muncul dari tantangan dalam mewujudkan keselamatan, kelancaran, ketertiban, dan kenyamanan dalam berlalu lintas dan transportasi. Dimana dalam rangka penanganan isu-isu strategis ini memerlukan koordinasi yang baik antar instansi terkait, partisipasi aktif masyarakat, serta dukungan dari pemerintah daerah. Dinas Perhubungan perlu menyusun rencana strategis yang komprehensif dan melaksanakan program-program yang efektif untuk mewujudkan sistem transportasi yang aman, lancar, nyaman, dan berkelanjutan di Kota Balikpapan. Identifikasi permasalahan didasarkan Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana pada tabel berikut ini.

*Tabel 2.4.1. Pemetaan Masalah untuk Penentuan*

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Penyebab Masalah / Akar Masalah</b>
Kualitas layanan angkutan umum perkotaan yang kurang memadai serta integrasi antar moda transportasi belum optimal.	Belum optimalnya Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal yang andal dan modern dalam melayani penumpang.	Pertumbuhan penduduk dan mobilitas masyarakat yang meningkat seringkali tidak diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang memadai.
Pembangunan terminal angkutan penumpang/ barang (Pembangunan Terminal Parkir Depo Kontainer Pergudangan dan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)) belum teralisasi.	Belum Tersedianya infrastruktur dalam hal ini terminal angkutan barang	Meningkatnya aktivitas angkutan barang dan tidak adanya lahan parkir yang cukup dan sesuai untuk angkutan barang terutama di daerah perkotaan menyebabkan kemacetan dan gangguan arus lalu lintas serta kejadian kecelakaan yang melibatkan kendaraan dimensi besar.
Pembangunan infrastruktur baru dan pertumbuhan jumlah kendaraan yang pesat menyebabkan peningkatan kebutuhan rambu lalu lintas.	Melakukan pemetaan dan analisis kondisi rambu lalu lintas untuk menentukan prioritas pemasangan dan perbaikan rambu.	Meningkatnya aktivitas angkutan barang dan tidak adanya lahan parkir yang cukup dan sesuai untuk angkutan barang terutama di daerah perkotaan menyebabkan kemacetan dan gangguan arus lalu lintas serta kejadian kecelakaan yang melibatkan kendaraan dimensi besar.



Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah / Akar Masalah
Peningkatan kebutuhan Lampu PJU pada kawasan baru dan wilayah tertentu.	Perencanaan pembangunan Lampu PJU mempertimbangkan kebutuhan penerangan keamanan dan keselamatan serta efisiensi energi	Kekurangan jumlah Lampu PJU meningkatkan risiko kecelakaan dan kejahatan.
Parkir di bahu jalan menyebabkan kemacetan dan potensi bahaya.	Belum optimalnya pengawasan terhadap pengelolaan parkir baik di tepi jalan umum maupun di lahan parkir swasta melakukan pelatihan bagi juru parkir menyediakan layanan yang lebih baik dan meningkatkan keamanan parkir.	Kurangnya ketersediaan lahan parkir menyebabkan praktik pungutan yang tidak resmi dan kurangnya kenyamanan bagi pengguna jalan.

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **3.1. Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029**

Berdasarkan telaah atas permasalahan, peluang dan tantangan serta memperhatikan kebijakan secara nasional di bidang transportasi, maka pembangunan transportasi di Kota Balikpapan ditujukan untuk mewujudkan sebuah sistem transportasi yang berkelanjutan atau yang selanjutnya disebut dengan *sustainable mobility*. Dinas Perhubungan Kota Balikpapan sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota Balikpapan dalam melaksanakan urusan Perhubungan, dalam rangka pencapaian Sasaran 2 RPMD Kota Balikpapan Dukungan Infrastruktur Yang Berkualitas maka sesuai dengan prioritas arahan pembangunan 2025-2029 yaitu fokus pada Misi ke dua yakni Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Yang Bisa Memenuhi Seluruh Kebutuhan Masyarakat Balikpapan diterjemahkan kedalam tujuan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yakni Meningkatkan Layanan Transportasi Yang Aman, Nyaman Dan Terjangkau Untuk Mendukung Mobilitas Masyarakat Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

### **3.2. Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029**

Guna mewujudkan tujuan Daerah Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tersebut, didukung melalui pencapaian sasaran perangkat daerah yang akan dicapai pada tahun 2025 hingga tahun 2029. Sasaran Dinas Perhubungan Kota Balikpapan meliputi:

1. Meningkatnya Layanan Transportasi Massal Terintegrasi dengan Indikator Sasaran adalah Cakupan Wilayah Yang Terlayani Angkutan Umum Massal.

2. Meningkatnya Keamanan Dan Kenyamanan Lalu Lintas dengan Indikator Sasaran adalah Tingkat Volume/Kapasitas (V/C) Ratio Jalan Kota;
3. Meningkatnya Persentase Kesesuaian Perlengkapan Jalan yang Terpasang dengan Kondisi Ideal;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Sasaran adalah Nilai AKIP Dinas Perhubungan Kota Balikpapan .

Dalam mewujudkan sasaran “Meningkatnya Layanan Transportasi Massal Terintegrasi” serta sasaran “Meningkatnya Keamanan Dan Kenyamanan Lalu Lintas”, fokus utama dalam penataan transportasi di Kota Balikpapan, yakni sistem transportasi di Perkotaan Balikpapan yang terintegrasi.. Penataan sistem transportasi di Perkotaan Balikpapan, dilandasi pada kondisi lalulintas di Perkotaan Balikpapan yang semakin didominasi oleh penggunaan kendaraan pribadi. Kemacetan lalulintas sebagai akibat dari adanya mobilitas orang maupun barang masih menjadi persoalan utama bagi penataan dan pengaturan transportasi di Perkotaan Balikpapan. Tingginya penggunaan kendaraan bermotor pribadi di jalan berdampak pada peningkatan emisi di sektor transportasi serta mengindikasikan bahwa angkutan umum masih belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, alternatif angkutan umum yang ada, masih sangat terbatas baik jumlah maupun jenis layanannya, sehingga menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dengan pertimbangan waktu perjalanan yang lebih efektif dan efisien.

Tabel 3.2.1. Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Balikpapan

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Dukungan Infrastruktur yang Berkualitas	Terwujudnya layanan Transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau		Tingkat Konektivitas Daerah	0.63	0.63	0.63	0.80	0.80	0.80	Trayek yang ada/ Trayek yang dibutuhkan
		Meningkatnya Layanan Transportasi Massal Terintegrasi	Cakupan Wilayah Terlayani Angkutan Umum Massal	42%	42%	42%	100%	100%	100%	% Wilayah Terlayani Angkutan Massal/ Wilayah Rencana Pelayanan
		Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lalu Lintas	V/C Ratio Jalan Kota	0.55	0.54	0.53	0.48	0.47	0.46	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas,		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kota Balikpapan	70.25	72.25	74.25	76.25	78.25	80.25	LHE Inspektorat

### 3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan memiliki strategi dalam lima tahun mendatang yang disajikan dalam tabel berikut:

*Tabel 3.3.1. Penahapan Renstra Dinas Perhubungan Kota Balikpapan*

TAHAP I 2025	TAHAP II 2026	TAHAP III 2027	TAHAP IV 2028	TAHAP V 2029
<b>Fokus Pembangunan Infrastruktur Ke-3</b>				
<b>Penyediaan sarana dan prasarana transportasi massal.</b>				
Perencanaan Pengembangan trayek dan aksesibilitas Transportasi Umum Massal (lokasi ?)	Pembangunan Prasarana Transportasi Angkutan Umum Massal. (lokasi ?)	Pemantapan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan Sistem Pengelolaan	Perluasan Cakupan Wilayah Layanan Transportasi Angkutan Umum Massal.	Mewujudkan Sistem Transportasi Umum Massal Terintegrasi.

		Angkutan Umum Massal.		
<b>Fokus Pembangunan Infrastruktur Ke-4</b> <b>Mewujudkan Balikpapan Terang.</b>				
Pembangunan PJU di wilayah studi di Kota Balikpapan	Pembangunan PJU di wilayah studi di Kota Balikpapan	Pembangunan PJU di wilayah studi di Kota Balikpapan	Pembangunan PJU di wilayah studi di Kota Balikpapan	Pembangunan PJU di wilayah studi di Kota Balikpapan
<b>Fokus Pembangunan Infrastruktur Ke-6</b> <b>Pembangunan konektivitas berkelanjutan.</b>				
Perencanaan Pengembangan Konektivitas	Perluasan Konektivitas melalui Pembangunan Terminal, Kelembagaan dan lanjutan Perencanaan Pengembangan Konektivitas Angkutan Umum	Percepatan Pengembangan Konektivitas di kawasan strategis.	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi, pelayanan dasar dan menjalin konektivitas serta mampu mewujudkan aksesibilitas ke seluruh wilayah.	Mewujudkan Prasarana Transportasi, Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Antar Moda.

3.4. Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran  
Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

*Tabel 3.4.1. Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Kota Balikpapan*

NO	OPERASIONALISASI NSPK (Norma Standar Prosedur Kreteria)	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur	Peningkatan layanan perkotaan terpadu berbasis teknologi,	Pengembangan transportasi angkutan massal perkotaan terintegrasi,	mobilitas yang lebih efisien nyaman dan berkelanjutan serta terjangkau bagi masyarakat perkotaan
		Peningkatan akses dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan dasar dan pendukung perekonomian,	Penyediaan perlengkapan jalan yang memadai dan terawat dengan baik,	Penyediaan perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas marka jalan dan lampu penerangan jalan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas di jalan kota, Perlengkapan jalan berfungsi dengan baik dan aman membantu pengguna jalan untuk memahami aturan memprediksi kondisi

NO	OPERASIONALISASI NSPK (Norma Standar Prosedur Kreteria)	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
				jalan dan mengurangi risiko kecelakaan
2	Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan kolaboratif serta pelayanan yang berkualitas	Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang akurat dan terukur implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) serta pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala



## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 4.1. Uraian Program

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, khususnya pada sektor perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan menetapkan arah kebijakan dan strategi melalui program-program prioritas yang dilaksanakan selama periode Renstra Tahun 2025–2030. Program-program ini disusun dengan memperhatikan isu strategis, kebutuhan masyarakat, serta perkembangan dinamika transportasi yang semakin kompleks, baik di darat maupun di laut.

Secara umum, terdapat tiga program utama yang menjadi kerangka kerja Dinas Perhubungan pada periode lima tahun mendatang, yaitu:

##### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Fokus utama meliputi peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi, tata kelola kelembagaan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Program ini juga diarahkan untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Dinas Perhubungan, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

##### 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini menjadi program utama Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pelayanan transportasi darat di Kota Balikpapan. Sasaran program diarahkan pada peningkatan keselamatan, kelancaran, dan keteraturan lalu lintas, serta optimalisasi pelayanan angkutan umum yang terintegrasi, aman, dan terjangkau bagi masyarakat. Kegiatan dalam program ini meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengendalian serta pengawasan angkutan jalan, peningkatan sarana prasarana pendukung lalu lintas, serta upaya penegakan hukum di bidang transportasi darat. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu menjawab tantangan urbanisasi, pertumbuhan kendaraan, serta kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus meningkat.

### 3. Program Penyelenggaraan Pelayaran

Sebagai kota pesisir dengan aktivitas perdagangan, jasa, dan logistik yang tinggi, Kota Balikpapan memerlukan sistem pelayaran yang andal. Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan transportasi laut, keselamatan pelayaran, serta pengawasan terhadap operasional angkutan laut. Kegiatan yang dilakukan mencakup pengelolaan fasilitas pelabuhan penyeberangan, peningkatan standar keselamatan kapal dan awak kapal, serta penguatan peran pelayaran rakyat sebagai bagian dari sistem transportasi terintegrasi. Program ini juga mendukung konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menunjang pengembangan ekonomi daerah.

Ketiga program tersebut merupakan instrumen utama Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama periode Renstra 2025–2030. Melalui pelaksanaan program-program ini, diharapkan terwujud sistem transportasi daerah yang aman, tertib, lancar, berkelanjutan, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tabel 4.1.1. Uraian Program

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					185.191.400.000,00		365.481.000.000,00		309.542.000.000,00		393.639.000.000,00		325.351.000.000,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					42.795.900.000,00		83.612.000.000,00		85.455.000.000,00		90.793.000.000,00		104.988.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	70	73	75	42.795.900.000,00	77	83.612.000.000,00	79	85.455.000.000,00	81	90.793.000.000,00	83	104.988.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					141.720.500.000,00		280.569.000.000,00		222.787.000.000,00		301.546.000.000,00		219.063.000.000,00	
Terselenggaranya Kinerja Lalu Lintas Kota Balikpapan	Konektivitas Darat (%)	42	42	53	141.720.500.000,00	64	280.569.000.000,00	75	222.787.000.000,00	86	301.546.000.000,00	100	219.063.000.000,00	Dinas Perhubungan
	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (%)	64.16	73.33	78.68		81.30		94.98		97.49		100		Dinas Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					675.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00	
Meningkatnya Pelayanan Kepelabuhanan	Konektivitas Laut (%)	50	50	50	675.000.000,00	50	1.300.000.000,00	50	1.300.000.000,00	50	1.300.000.000,00	50	1.300.000.000,00	Dinas Perhubungan
TOTAL KESELURUHAN					185.191.400.000,00		365.481.000.000,00		309.542.000.000,00		393.639.000.000,00		325.351.000.000,00	

#### 4.2. Uraian Kegiatan

Untuk mencapai sasaran pembangunan sektor perhubungan sebagaimana telah ditetapkan dalam program kerja, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan melaksanakan serangkaian kegiatan yang mencakup aspek teknis penyelenggaraan transportasi darat maupun laut, serta kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah. Kegiatan tersebut diarahkan guna memastikan tersedianya pelayanan transportasi yang aman, tertib, lancar, dan berkelanjutan serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. kegiatan yang diampu oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.  
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas melalui penyediaan rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta perlengkapan jalan lainnya sesuai standar teknis.
2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C. Difokuskan pada pengelolaan operasional terminal penumpang agar berfungsi optimal sebagai simpul transportasi, serta memberikan pelayanan yang nyaman, aman, dan teratur bagi pengguna jasa angkutan umum.
3. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota. Kegiatan ini meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, serta evaluasi arus lalu lintas untuk menciptakan kondisi jalan yang lebih tertib dan efisien.

4. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota. Dilaksanakan guna memastikan bahwa pembangunan fasilitas baru tidak menimbulkan permasalahan lalu lintas, serta tetap sesuai dengan peraturan dan rencana tata ruang.
5. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai kelayakan sarana dan prasarana transportasi, mengidentifikasi potensi risiko, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
6. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota. Dilaksanakan untuk menyediakan layanan transportasi umum yang memadai, terjangkau, serta mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang di wilayah Kota Balikpapan.
7. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diarahkan untuk menyusun jaringan trayek yang terintegrasi, adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendukung pengembangan angkutan umum massal di perkotaan.
8. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota. Bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan angkutan umum.

9. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal. Kegiatan ini mendukung peningkatan layanan transportasi laut serta memperkuat konektivitas antarwilayah melalui pengembangan pelabuhan pengumpan lokal.
10. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Merupakan bagian dari siklus manajemen pemerintahan yang memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai target serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
11. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Meliputi proses pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Kegiatan ini mencakup pengelolaan aset daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
13. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Difokuskan pada tata kelola sumber daya manusia, termasuk pengembangan kompetensi dan peningkatan disiplin aparatur.
14. Administrasi Umum Perangkat Daerah. Berfungsi untuk mendukung kelancaran operasional dinas dalam aspek pelayanan administrasi internal.
15. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Bertujuan menyediakan sarana dan prasarana penunjang operasional pemerintahan yang sesuai kebutuhan.

16. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Meliputi penyediaan layanan pendukung yang diperlukan untuk kelancaran tugas kedinasan.
17. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Menjamin keberlanjutan fungsi sarana dan prasarana melalui perawatan yang teratur dan sesuai standar.
18. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Kegiatan ini ditujukan untuk menjamin kelayakan operasional kendaraan bermotor, meningkatkan keselamatan lalu lintas, serta mengurangi dampak lingkungan dari emisi kendaraan.
19. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir  
Bertujuan untuk menata dan mengendalikan fasilitas parkir agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung keteraturan lalu lintas di perkotaan.

Melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang transportasi, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendukung terwujudnya sistem transportasi yang andal, selamat, nyaman, dan berkelanjutan di periode 2025–2029.



*Tabel 4.2.1. Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Strategis*

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN</b>							
- Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas	Terwujudnya layanan Transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau				Rasio konektivitas kabupaten/kota		
		Meningkatnya Layanan Transportasi Massal Terintegrasi			Cakupan Wilayah yang Terlayani Angkutan Umum Massal		
			Terselenggaranya Kinerja Lalu Lintas Kota Balikpapan		Konektivitas Darat	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
				Persentase Terminal Penumpang Tipe C yang dikelola	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	2.15.02.2.03.0006 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2.15.02.2.03.0007 - Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
					Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	2.15.02.2.03.0009 - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	2.15.02.2.03.0010 - Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
				Persentase Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	2.15.02.2.06.0013 - Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.0014 - Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2.15.02.2.06.0016 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
					Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				Persentase Permohonan Andalalin Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2.15.02.2.07.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	
					Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	2.15.02.2.07.0005 - Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	
					Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	2.15.02.2.07.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	
				Persentase Tingkat Pelanggaran Angkutan Orang dan Barang	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
					Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
					Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2.15.02.2.08.0007 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
					Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	2.15.02.2.08.0008 - Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
				Persentase Perusahaan Angkutan Orang/ Barang Tersosialisasi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2.15.02.2.09.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Persentase Tersusunnya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.11 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.11.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Persentase Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Orang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.14 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2.15.02.2.14 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.14.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2.15.02.2.14.0003 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
			Meningkatnya Pelayanan Kepelabuhanan		Konektivitas Laut	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
				Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Kepelabuhanan yang Dikelola	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	2.15.03.2.12 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	
					Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	2.15.03.2.12 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	2.15.03.2.12.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	
					Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	2.15.03.2.12.0004 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terwujudnya pengelolaan barang daerah yang tertib, efisien, efektif,	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.15.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				akuntabel, dan transparan.			
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.15.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terwujudnya profesionalisme aparatur perangkat daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.15.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.15.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	2.15.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terwujudnya layanan umum perkantoran perangkat daerah.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.15.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.15.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.15.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.15.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2.15.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.15.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.15.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.15.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2.15.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.15.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2.15.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.15.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.15.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.15.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.15.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terwujudnya operasional umum perangkat daerah.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.15.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar berfungsi optimal.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	2.15.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.15.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.15.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.15.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR							
- Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas	Terwujudnya layanan Transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Meningkatnya Layanan Transportasi Massal Terintegrasi	Terselenggaranya Kinerja Lalu Lintas Kota Balikpapan		Konektivitas Darat	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Persentase Kendaraan Laik Jalan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2.15.02.2.05.0002 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	2.15.02.2.05.0003 - Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.0005 - Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.0008 - Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.0009 - Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.0010 - Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
2.15.0.00.0.00.01.0002 - UPTD PENGELOLAAN PARKIR							
- Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas	Terwujudnya layanan Transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Meningkatnya Layanan Transportasi Massal Terintegrasi	Terselenggaranya Kinerja Lalu Lintas Kota Balikpapan		Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Persentase Lokasi Parkir yang dikelola	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	

#### 4.3. Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif

Dalam rangka mendukung pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan menyusun berbagai subkegiatan yang lebih operasional dan langsung menyentuh kebutuhan pelayanan publik maupun tata kelola internal. Subkegiatan ini disusun dengan memperhatikan arah kebijakan daerah, peraturan perundang-undangan, serta dinamika kebutuhan masyarakat terhadap transportasi yang selamat, tertib, lancar, dan berkelanjutan. Setiap subkegiatan diarahkan untuk menghasilkan kinerja spesifik yang dapat diukur melalui indikator kinerja yang jelas, baik dari sisi output maupun outcome. Indikator ini digunakan sebagai instrumen evaluasi untuk menilai sejauh mana capaian yang diperoleh sesuai dengan target pembangunan sektor perhubungan. Selain indikator kinerja, setiap subkegiatan juga disertai dengan pagu indikatif, yaitu alokasi anggaran yang diproyeksikan untuk lima tahun ke depan. Pagu indikatif berfungsi sebagai dasar perencanaan pembiayaan dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

Untuk memperjelas arah capaian, pada bagian berikutnya akan disajikan tabel yang memuat uraian subkegiatan, indikator kinerja, target capaian tahunan, serta pagu indikatif masing-masing subkegiatan. Matriks ini sekaligus menjadi dasar pengendalian, evaluasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan pada periode 2025–2030.

Tabel 4.3.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				185.191.400.000		365.481.000.000		309.542.000.000		393.639.000.000		325.351.000.000		
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				42.795.900.000		83.612.000.000		85.455.000.000		90.793.000.000		104.988.000.000		
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	70	75	42.795.900.000	77	83.612.000.000	79	85.455.000.000	81	90.793.000.000	83	104.988.000.000	2.15.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		139.200.000		153.120.000		160.600.000		176.660.000		
Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	0	-	6	139.200.000	6	153.120.000	6	160.600.000	6	176.660.000		
2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-		139.200.000		153.120.000		160.600.000		176.660.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2	0	-	6	139.200.000	6	153.120.000	6	160.600.000	6	176.660.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Perangkat Daerah													
2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				22.180.400.000		27.707.069.355		30.478.497.543		33.525.600.550		36.878.481.861		
Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117	170	22.180.400.000	170	27.707.069.355	180	30.478.497.543	190	33.525.600.550	200	36.878.481.861		
2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				22.180.400.000		27.707.069.355		30.478.497.543		33.525.600.550		36.878.481.861		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117	170	22.180.400.000	170	27.707.069.355	180	30.478.497.543	190	33.525.600.550	200	36.878.481.861		
2.15.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		
Terwujudnya pengelolaan barang daerah yang tertib, efisien, efektif, akuntabel, dan transparan.	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	-	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000		
2.15.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				-		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	-	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-		3.971.229.600		4.158.352.560		4.364.187.816		4.590.606.597		
Terwujudnya profesionalisme aparatur perangkat daerah.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	155	0	-	210	3.971.229.600	220	4.158.352.560	230	4.364.187.816	230	4.590.606.597		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	0	0		25		25		25		25			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	0		250		250		250		250			
2.15.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				-		1.871.229.600		2.058.352.560		2.264.187.816		2.490.606.597		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	155	0	-	210	1.871.229.600	220	2.058.352.560	230	2.264.187.816	230	2.490.606.597		
2.15.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	0	-	250	2.000.000.000	250	2.000.000.000	250	2.000.000.000	250	2.000.000.000		
2.15.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				-		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	-	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000		
2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					9.695.000.000		6.454.603.121		4.403.263.433		4.671.789.776		4.988.968.752	
Terwujudnya layanan umum perkantoran perangkat daerah.	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	9.695.000.000	12	6.454.603.121	12	4.403.263.433	12	4.671.789.776	12	4.988.968.752		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	0	4		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Elektronik pada SKPD													
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	0		15		15		15		15			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19	16		20		21		22		22			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	31	4		25		25		25		25			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	74	7		7		7		7		7			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat	110	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	4	3		3		3		3		3			
2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi  Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		78.995.510		86.895.061		95.584.567		105.143.023		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	19	16	50.000.000	20	78.995.510	21	86.895.061	22	95.584.567	22	105.143.023		
2.15.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		2.950.000.000		700.000.000		750.000.000		825.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	0	-	15	2.950.000.000	15	700.000.000	15	750.000.000	15	825.000.000		
2.15.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		143.000.000		157.300.000		173.030.000		190.333.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	0	-	1	143.000.000	1	157.300.000	1	173.030.000	1	190.333.000		
2.15.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				595.000.000		943.363.740		1.037.700.114		1.141.470.125		1.255.617.137		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	74	7	595.000.000	7	943.363.740	7	1.037.700.114	7	1.141.470.125	7	1.255.617.137		
2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				196.000.000		821.243.871		903.368.258		993.705.084		1.093.075.592		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	31	4	196.000.000	25	821.243.871	25	903.368.258	25	993.705.084	25	1.093.075.592		
2.15.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				4.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		19.800.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	4	3	4.000.000	3	18.000.000	3	18.000.000	3	18.000.000	3	19.800.000		
2.15.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				-		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	0	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
2.15.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				-		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	-	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000		
2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						500.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110	12		12	500.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000		
2.15.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	-	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000		
2.15.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						8.350.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	0	4		12	8.350.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		19.786.400.000		19.655.040.000		20.305.544.000		20.963.598.400			
Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	1	19.786.400.000	1	19.655.040.000	1	20.305.544.000	1	20.963.598.400			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0		1				1						1
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0		1				1						1
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	0	0		4				4						4

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dinas Jabatan yang Disediakan													
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6	0		10		10		10		10			
	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0		8		8		8		8			
2.15.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		686.400.000		755.040.000		830.544.000		913.598.400		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	-	4	686.400.000	4	755.040.000	4	830.544.000	4	913.598.400		
2.15.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		2.100.000.000		2.150.000.000		2.175.000.000		2.200.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	6	0	-	10	2.100.000.000	10	2.150.000.000	10	2.175.000.000	10	2.200.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Lapangan yang Disediakan													
2.15.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar				-		2.000.000.000		2.500.000.000		3.000.000.000		3.500.000.000		
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0	0	-	2	2.000.000.000	2	2.500.000.000	2	3.000.000.000	2	3.500.000.000		
2.15.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				-		300.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	-	8	300.000.000	8	350.000.000	8	400.000.000	8	450.000.000		
2.15.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	-	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		
2.15.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		13.500.000.000		13.500.000.000		13.500.000.000		13.500.000.000		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	1	13.500.000.000	1	13.500.000.000	1	13.500.000.000	1	13.500.000.000		
2.15.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		900.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	1	900.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.160.500.000		14.198.712.523		14.476.462.523		14.781.987.523		15.118.065.023		
Terwujudnya operasional umum perangkat daerah.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	12	6.160.500.000	12	14.198.712.523	12	14.476.462.523	12	14.781.987.523	12	15.118.065.023		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39	12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1		1		1		1		1			
2.15.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	500.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.210.000.000		2.777.500.000		3.055.250.000		3.360.775.000		3.696.852.500		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	12	1.210.000.000	12	2.777.500.000	12	3.055.250.000	12	3.360.775.000	12	3.696.852.500		
2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.950.000.000		11.416.212.523		11.416.212.523		11.416.212.523		11.416.212.523		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39	12	4.950.000.000	12	11.416.212.523	12	11.416.212.523	12	11.416.212.523	12	11.416.212.523		
2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.760.000.000		6.354.785.401		7.130.263.941		7.983.290.335		17.271.619.367		
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar berfungsi optimal.	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	4.760.000.000	25	6.354.785.401	25	7.130.263.941	25	7.983.290.335	25	17.271.619.367		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	119	121		132		142		152		166			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	319	133		45		45		45					
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	0	2		8		8		8		9			
2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3.250.000.000		3.086.992.509		3.545.691.760		4.050.260.936		2.955.287.029		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	119	121	3.250.000.000	132	3.086.992.509	142	3.545.691.760	152	4.050.260.936	166	2.955.287.029		
2.15.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				-		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	-	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				960.000.000		1.693.516.880		1.862.868.568		2.049.155.425		2.254.070.967		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	319	133	960.000.000	45	1.693.516.880	45	1.862.868.568	45	2.049.155.425	45	2.254.070.967		
2.15.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				550.000.000		1.474.276.012		1.621.703.613		1.783.873.974		11.962.261.371		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	0	2	550.000.000	8	1.474.276.012	8	1.621.703.613	8	1.783.873.974	9	11.962.261.371		
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				141.720.500.000		280.569.000.000		222.787.000.000		301.546.000.000		219.063.000.000		
Terselenggaranya Kinerja Lalu Lintas Kota Balikpapan	Konektivitas Darat	42	53	141.720.500.000	64	280.569.000.000	75	222.787.000.000	86	301.546.000.000	100	219.063.000.000	2.15.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PERHUBUNGAN	
	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	64.16	78.68		81.30		94.98		97.49		100			
2.15.02.2.02 - Penyediaan				122.849.200.000		71.897.007.775		70.569.128.622		75.583.160.257		76.553.185.802		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	157	49	122.849.200.000	176	71.897.007.775	206	70.569.128.622	234	75.583.160.257	263	76.553.185.802		
	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	36090	19858		55416		59666		63916		63916			
	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	19	49		30		26		29		32			
	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	24000	3496		1632		1760		1767		1817			
2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				1.100.000.000		7.924.321.512		7.400.087.362		9.057.087.362		8.296.230.789		
Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	19	49	1.100.000.000	30	7.924.321.512	26	7.400.087.362	29	9.057.087.362	32	8.296.230.789		
2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				83.699.200.000		23.949.000.000		21.488.000.000		24.749.000.000		24.939.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	24000	3496	83.699.200.000	1632	23.949.000.000	1760	21.488.000.000	1767	24.749.000.000	1817	24.939.000.000		
2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan				1.100.000.000		2.225.000.000		3.131.761.783		3.952.773.567		4.268.966.791		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	157	49	1.100.000.000	176	2.225.000.000	206	3.131.761.783	234	3.952.773.567	263	4.268.966.791		
2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				36.950.000.000		37.798.686.263		38.549.279.477		37.824.299.328		39.048.988.222		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	36090	19858	36.950.000.000	55416	37.798.686.263	59666	38.549.279.477	63916	37.824.299.328	63916	39.048.988.222		
2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				2.815.000.000		71.440.000.000		16.440.000.000		88.440.000.000		3.440.000.000		
Persentase Terminal Penumpang Tipe C yang dikelola	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	0	1	2.815.000.000	1	71.440.000.000	1	16.440.000.000	0	88.440.000.000	0	3.440.000.000		
	Jumlah Terminal yang	0	0		1		0		1		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)													
	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	0	0		5		5		5		5			
	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	0	0		4		4		4		4			
	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1	1		1		1		1		1			
2.15.02.2.03.0006 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C				-		3.020.000.000		3.020.000.000		3.020.000.000		3.020.000.000		
Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	0	0	-	4	3.020.000.000	4	3.020.000.000	4	3.020.000.000	4	3.020.000.000		
2.15.02.2.03.0007 - Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)				-		56.000.000.000		-		85.000.000.000		-		
Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi	0	0	-	1	56.000.000.000	0	-	1	85.000.000.000	0	-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Fasilitas Utama dan Penunjang)													
2.15.02.2.03.0009 - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				2.500.000.000		12.000.000.000		13.000.000.000		-		-		
Terbangunnya Terminal Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	0	1	2.500.000.000	1	12.000.000.000	1	13.000.000.000	0	-	0	-		
2.15.02.2.03.0010 - Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C				-		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		
Terlaksana Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	0	0	-	5	120.000.000	5	120.000.000	5	120.000.000	5	120.000.000		
2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)				315.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1	1	315.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		
2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1.810.800.000		4.984.660.250		4.976.393.263		5.175.212.926		5.088.407.947		
Persentase Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	0	0	1.810.800.000	9	4.984.660.250	9	4.976.393.263	9	5.175.212.926	9	5.088.407.947		
	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	3	3		4		4		4		4			
	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan	4	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jalan Kabupaten/Kota													
	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	5	1		4		4		4		4			
	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	33	0		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2	1		0		0		0		0			
2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				-		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		
Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian	0	0	-	9	800.000.000	9	800.000.000	9	800.000.000	9	800.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
untuk Jalan Kabupaten/Kota	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota													
2.15.02.2.06.0013 - Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)				-		525.000.000		551.250.000		578.812.500		578.812.500		
Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	33	0	-	5	525.000.000	5	551.250.000	5	578.812.500	5	578.812.500		
2.15.02.2.06.0014 - Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				8.000.000		-		-		-		-		
Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2	1	8.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		
2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				252.000.000		1.014.410.250		1.065.130.763		1.118.387.301		1.174.306.666		
Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan	4	2	252.000.000	2	1.014.410.250	2	1.065.130.763	2	1.118.387.301	2	1.174.306.666		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota													
2.15.02.2.06.0016 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				500.000.000		1.795.250.000		1.710.012.500		1.828.013.125		1.885.288.781		
Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	5	1	500.000.000	4	1.795.250.000	4	1.710.012.500	4	1.828.013.125	4	1.885.288.781		
2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1.050.800.000		850.000.000		850.000.000		850.000.000		650.000.000		
Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provi nsi	3	3	1.050.800.000	4	850.000.000	4	850.000.000	4	850.000.000	4	650.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				-		243.784.800		255.974.040		268.772.742		222.175.095		
Persentase Permohonan Andalalin Ditindaklanjuti	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	0	0	-	3	243.784.800	3	255.974.040	3	268.772.742	3	222.175.095		
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	0	0		12		12		12		12			
	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	0	0		4		4		4		4			
2.15.02.2.07.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				-		132.300.000		138.915.000		145.860.750		93.117.503		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	0	0	-	12	132.300.000	12	138.915.000	12	145.860.750	12	93.117.503		
2.15.02.2.07.0005 - Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin				-		84.672.000		88.905.600		93.350.880		98.018.424		
Meningkatnya Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan	0	0	-	3	84.672.000	3	88.905.600	3	93.350.880	3	98.018.424		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	kompetensinya dan tersertifikasi													
2.15.02.2.07.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin				-		26.812.800		28.153.440		29.561.112		31.039.168		
Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	0	0	-	4	26.812.800	4	28.153.440	4	29.561.112	4	31.039.168		
2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				2.500.000.000		7.800.000.000		4.300.000.000		4.300.000.000		4.300.000.000		
Persentase Tingkat Pelanggaran Angkutan Orang dan Barang	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	19	19	2.500.000.000	20	7.800.000.000	19	4.300.000.000	19	4.300.000.000	19	4.300.000.000		
	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	0	0				20				20			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.2.08.0007 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				2.500.000.000		7.500.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	19	19	2.500.000.000	20	7.500.000.000	19	4.000.000.000	19	4.000.000.000	19	4.000.000.000		
2.15.02.2.08.0008 - Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				-		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	0	0	-	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000		
2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				725.000.000		99.892.000.000		102.060.000.000		102.060.000.000		102.060.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Perusahaan Angkutan Orang/ Barang Tersosialisasi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	0	0	725.000.000	19	99.892.000.000	60	102.060.000.000	60	102.060.000.000	60	102.060.000.000		
	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0	6		5		4		4		4			
2.15.02.2.09.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				725.000.000		87.892.000.000		560.000.000		560.000.000		560.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0	6	725.000.000	5	87.892.000.000	4	560.000.000	4	560.000.000	4	560.000.000		
2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-		12.000.000.000		101.500.000.000		101.500.000.000		101.500.000.000		
Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	0	0	-	19	12.000.000.000	60	101.500.000.000	60	101.500.000.000	60	101.500.000.000		
2.15.02.2.11 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				500.000.000		500.000.000		-		-		-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Tersusunnya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	1	500.000.000	1	500.000.000	0	-	0	-	0	-		
2.15.02.2.11.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				500.000.000		500.000.000		-		-		-		
Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	1	500.000.000	1	500.000.000	0	-	0	-	0	-		
2.15.02.2.14 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-		250.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Orang	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	0	-	1	250.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000		
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0		2		2		2		2			
2.15.02.2.14.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam					-	50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	-	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000		
2.15.02.2.14.0003 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						200.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan	1	0	-	1	200.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik													
Terselenggaranya Kinerja Lalu Lintas Kota Balikpapan	Konektivitas Darat	42	42	141.720.500.000	42	280.569.000.000	80	222.787.000.000	80	301.546.000.000	80	219.063.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	
2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				5.720.500.000		15.900.000.000		16.475.000.000		17.825.000.000		19.350.000.000		
Persentase Kendaraan Laik Jalan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggara n Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4	4	5.720.500.000	4	15.900.000.000	4	16.475.000.000	4	17.825.000.000	4	19.350.000.000		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20	10		20		20		20		20			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala	1	4		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kendaraan Bermotor yang Tersedia													
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	22	10		16		18		20		22			
	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0		3		4		5		6			
	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0		6		6		6		6			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8000	8532		30000		35000		40000		50000			
	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	0	0		1500		2000		2500		2500			
2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2.180.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1	4	2.180.000.000	2	10.000.000.000	2	10.000.000.000	2	10.000.000.000	2	10.000.000.000		
2.15.02.2.05.0002 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				175.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan	20	10	175.000.000	20	350.000.000	20	400.000.000	20	450.000.000	20	500.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya													
2.15.02.2.05.0003 - Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor				-		150.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terdaptarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaptar	0	0	-	1500	150.000.000	2000	200.000.000	2500	250.000.000	2500	250.000.000		
2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				305.000.000		750.000.000		875.000.000		1.000.000.000		1.250.000.000		
Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8000	8532	305.000.000	30000	750.000.000	35000	875.000.000	40000	1.000.000.000	50000	1.250.000.000		
2.15.02.2.05.0005 - Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				-		225.000.000		300.000.000		375.000.000		400.000.000		
Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian	0	0	-	3	225.000.000	4	300.000.000	5	375.000.000	6	400.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Berkala Kendaraan Bermotor													
2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2.960.500.000		3.750.000.000		4.000.000.000		5.000.000.000		6.000.000.000		
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	22	10	2.960.500.000	16	3.750.000.000	18	4.000.000.000	20	5.000.000.000	22	6.000.000.000		
2.15.02.2.05.0008 - Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				100.000.000		275.000.000		300.000.000		350.000.000		450.000.000		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraa n Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4	4	100.000.000	4	275.000.000	4	300.000.000	4	350.000.000	4	450.000.000		
2.15.02.2.05.0009 - Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				-		150.000.000		150.000.000		150.000.000		200.000.000		
Ditetapkannya Tarif Retribusi Pengujian	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi	0	0	-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
2.15.02.2.05.0010 - Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						250.000.000		250.000.000		250.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraa n Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	-	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	6	300.000.000		
Terselenggaranya Kinerja Lalu Lintas Kota Balikpapan	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	90	92	141.720.500.000	93	280.569.000.000	94	222.787.000.000	95	301.546.000.000	96	219.063.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0002 - UPTD PENGELOLAAN PARKIR	
2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				4.800.000.000		7.661.547.175		7.585.504.075		7.768.854.075		7.924.231.156		
Persentase Lokasi Parkir yang dikelola	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraa n dan	1	1	4.800.000.000	12	7.661.547.175	12	7.585.504.075	12	7.768.854.075	12	7.924.231.156		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota													
2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				4.800.000.000		7.661.547.175		7.585.504.075		7.768.854.075		7.924.231.156		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraa n dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	4.800.000.000	12	7.661.547.175	12	7.585.504.075	12	7.768.854.075	12	7.924.231.156		
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				675.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		
Meningkatnya Pelayanan Kepelabuhanan	Konektivitas Laut	50	50	675.000.000	50	1.300.000.000	50	1.300.000.000	50	1.300.000.000	50	1.300.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.03.2.12 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan				675.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal														
Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Kepelabuhanan yang Dikelola	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	1	1	675.000.000	1	1.300.000.000	1	1.300.000.000	1	1.300.000.000	1	1.300.000.000		
	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	2	2		4		4		4		4			
2.15.03.2.12.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal				250.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	1	1	250.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000		
2.15.03.2.12.0004 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				425.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		
Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan	2	2	425.000.000	4	800.000.000	4	800.000.000	4	800.000.000	4	800.000.000		

[illegible]

#### 4.4. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan Program Prioritas Pembangunan Daerah dan tujuan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Meningkatkan Layanan Transportasi Yang Aman, Nyaman Dan Terjangkau Untuk Mendukung Mobilitas Masyarakat Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah didukung melalui program, kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut:

*Tabel 4.4.1. Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung*

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	Mewujudkan Balikpapan Terang (Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ))	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lalu Lintas	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Subkegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatkan keselamatan lalu lintas keamanan pengguna jalan dan kenyamanan berkendara terutama di malam hari serta memberikan keindahan lingkungan dan mendukung aktivitas ekonomi.
2	Penyediaan sarana dan prasarana transportasi massal (Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ))	Meningkatnya Layanan Transportasi Massal Terintegrasi	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Subkegiatan Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota)	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan transportasi publik

3	Pembangunan Konektivitas Berkelanjutan (Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ))	Meningkatnya Layanan Transportasi Massal Terintegrasi	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C (Subkegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang & Subkegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang))	
---	--	---	--	--

#### 4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan

Indikator Kinerja Utama adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi telah mencapai tujuan atau target tertentu. Dalam rangka pengukuran kinerja maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

*Tabel 4.5.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Balikpapan*

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	nilai	0.5	0.5	0.51	0.52	0.53		
2	V/C Ratio di Jalan Kota	nilai	0.55	0.54	0.53	0.52	0.51		
3	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kota Balikpapan	nilai	70.25	72.25	74.25	76.25	78.25		

4.6. Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci digunakan untuk menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pembangunan berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 yang mengatur lebih detail mengenai pelaksanaan PP. Pemerintah daerah wajib menyusun Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya.

Dalam pencapaian keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pembangunan, Dinas Perhubungan sesuai kewenangan menyelenggarakan urusan perhubungan dengan indikator sebagai berikut :

*Tabel 4.6.1. Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan Kota Balikpapan*

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	nilai	0.63	0.63	0.63	0.80	0.80	0.52	
2	V/C Ratio di Jalan Kota	nilai	0.55	0.55	0.54	0.53	0.52	0.51	

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 akan disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk di kompilasi serta akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah serta ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan. Rencana Strategis memuat kebijaksanaan dan pokok-pokok program pembangunan yang bersifat strategis untuk menjadi acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.

Untuk mewujudkan terciptanya Sasaran Dinas Perhubungan maka Rencana Strategis (RENSTRA) dituangkan ke dalam bentuk program-program pembangunan yang kongkrit, terarah dan transparan dalam usulan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Kota Balikpapan.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

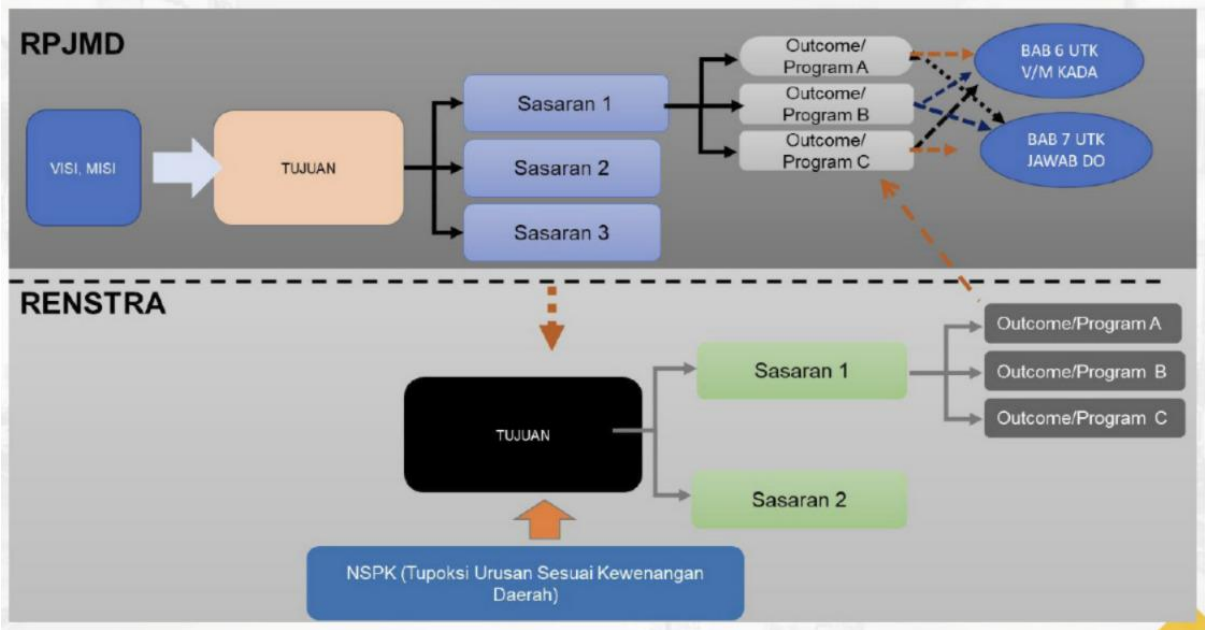
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dewasa ini telah memberikan ruang gerak yang cukup leluasa bagi masyarakat untuk dapat memperoleh layanan dan informasi yang handal. Pemerintah dituntut untuk responsive bertahap terus menerus melakukan pembenahan atas layanan penyelenggaraan administrasi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang saat ini telah diterapkan di berbagai layanan publik. Tanpa disadari TIK telah merubah cara hidup, pola pikir, cara bermain dan cara belajar manusia, sehingga menjadi salah satu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia sehari-hari.

Berangkat dari kondisi tersebut, Pemerintah sebagai penyedia layanan publik dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, handal dan transparan kepada masyarakat melalui pemanfaatan TIK secara maksimal. Demikian pula halnya dengan Pemerintah Kota Balikpapan, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, diharapkan pemanfaatan TIK dapat diterapkan secara maksimal pada seluruh layanan publik dan layanan internal.

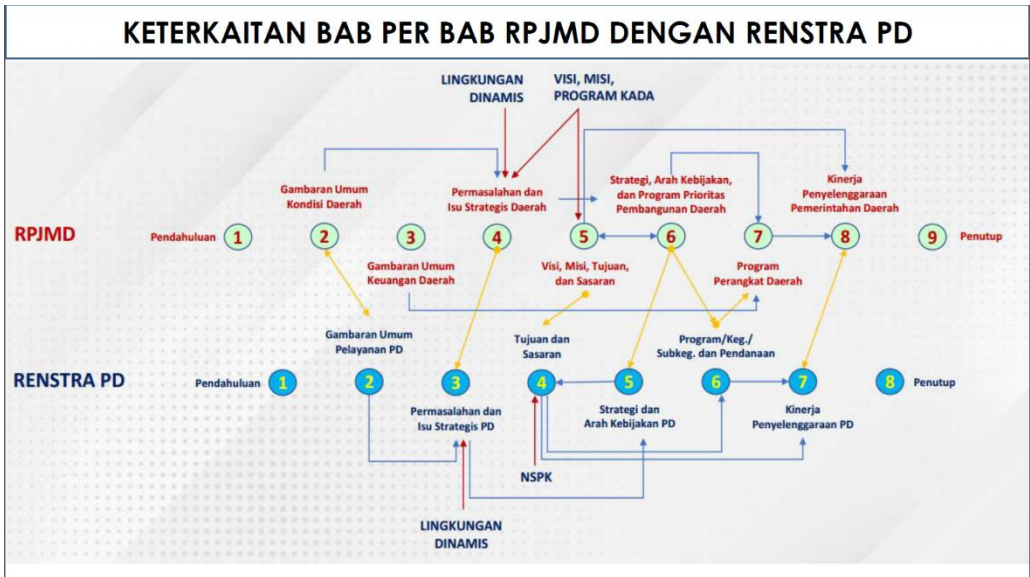
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) harus membuat dokumen perencanaan lima tahun berupa Rencana Strategis (Renstra). Renstra adalah dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja PD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintah daerah.

Renstra sebagai dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan 2025 - 2029 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2025 - 2029 dan Renja PD, keterkaitan tahapan penyusunan antara Renstra OPD dengan RPJMD Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, yakni sebagai berikut:



**Gambar 1. 1**  
**Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Strategis 2025 - 2029**



**Gambar 1. 2**  
**Hubungan antara RPJMD Kota Balikpapan dengan Renstra**

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan dilakukan secara simultan atau bersamaan waktunya dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2025 - 2029.

Renstra merupakan komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kota Balikpapan serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang



dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kota Balikpapan dalam RPJP Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2045, yaitu **“Balikpapan Nyaman untuk Semua 2045 (Superhub Industri jasa yang maju dan Berkelanjutan dengan Semangat Madinatul Iman)”**.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, secara garis besar tahapan penyusunan renstra dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu :

1. Persiapan Penyusunan Renstra, meliputi :
  - a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
  - b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
  - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
  - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD, mencakup :

- a. analisis gambaran pelayanan;
- b. analisis permasalahan;
- c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. analisis isu strategis;
- e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
- g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;

- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

### 3. Penyusunan Rancangan Renstra

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah, mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.

Rancangan Renstra dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Hasil kesepakatan forum dirumuskan dalam Berita Acara dan disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda Litbang untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Selanjutnya Bappeda Litbang melakukan verifikasi untuk memastikan rancangan Renstra telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, bappeda Litbang menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi yang diberikan kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda Litbang. Hasil Verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra Perangkat Daerah.

### 4. Tahapan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda Litbang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima.

## 5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra

Perumusan rancangan akhir Renstra merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra menjadi rancangan akhir Renstra berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD yang disajikan dengan sistematika yang sudah ditentukan.

## 6. Penetapan Renstra

Rancangan akhir Renstra disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda Litbang untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan dan selanjutnya Bappeda Litbang menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan dan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

### 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang mendasari pembuatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan (lembar negara RI Tahun 1953 No.9) sebagai Undang-undang (lembar Negara RI nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - Undang RI Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas sistem keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penatausahaan Gender di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Beritan Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2036;
27. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032;
28. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan 2025-2045;
29. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan 2025-2029;
30. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
31. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Penetapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025–2045.

Tujuan penyusunan penetapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 :

1. Memberikan gambaran, informasi sasaran strategis, permasalahan dan kondisi capaian pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Menetapkan Program dan Kegiatan yang terukur sesuai pedoman tahapan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan;
3. Sebagai acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi serta kebijakan strategis capaian yang menjadi landasan penyusunan Program dan kegiatan 5 (lima) tahun mendatang.

### **1.4 Sistematika Penyusunan**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 - 2029 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **Bab I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
  - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah;
  - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
  - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - 2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah
  - 2.2.2 Isu Strategis

#### **Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029;
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029;
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029;
- 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan

## Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029

### Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
- 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

### BAB V PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Komunikasi dan Informatika Balikpapan merupakan perangkat Daerah yang mengampu 3 (tiga) urusan pemerintahan yakni urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian. Dalam pelayanannya Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan pelayanan terkait informasi, teknologi dan komunikasi baik untuk internal Pemerintah Kota Balikpapan maupun untuk masyarakat. Tujuan dari pelayanan ini adalah untuk mendukung salah satu tujuan Kota Balikpapan yakni **“Meningkatnya Kualitas Digitalisasi Layanan Publik”**.

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan di bidang statistik, urusan pemerintahan di bidang persandian serta tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan Tipe C yang dipimpin Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi, pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi, pengembangan e-Government, persandian, statistik sektora;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi, pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi dan pengembangan e-Government, persandian, statistik sektoral;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi, pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi, pengembangan e-Government, persandian, statistik sektoral;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang membawahkan:
  - 1. Subbagian Umum; dan
  - 2. Subbagian Program dan Keuangan;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi, yang membawahkan:
  - 1. Seksi Statistik, Persandian, Pos dan Infrastruktur Telekomunikasi; dan
  - 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang e-Government, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. UPTD

Adapun Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :



**Gambar 2. 1**  
**Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika**

Tugas dan Fungsi Pokok dan Fungsi dari setiap struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

- 1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi, pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi, pengembangan e-Government, persandian, dan statistik sektoral;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi, pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi dan pengembangan e-Government, persandian, statistik sektoral, dan bina e-Government,
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi, pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi, pengembangan e-Government, persandian, dan statistik sektoral; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian:

- a. perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
- b. administrasi keuangan;
- c. administrasi barang milik Daerah pada Dinas;
- d. administrasi kepegawaian;
- e. administrasi umum;
- f. pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah;
- g. pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah;
- h. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah;
- i. layanan informasi dan pengaduan; dan
- j. pembinaan pelayanan publik.

Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;

- b. pengoordinasian penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan keputakaan;
- f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran Dinas dan penenmaan retribusi;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. pembinaan dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik;
- k. pengelolaan survei kepuasan masyarakat;
- l. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- m. pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksana;
- n. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
- o. pengoordinasian bidang dan UPTD;
- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat terdiri atas:

- 1. Subbagian Umum, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
  - b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
  - c. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
  - d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
  - e. menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
  - f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
  - g. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
  - h. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;

- i. menyelenggarakan administrasi kepegawaian; menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- j. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- k. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- l. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- m. memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
- n. mengelola informasi dan dokumentasi serta pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;
- o. menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- p. memfasilitasi pembinaan tatakelola pelayanan publik;
- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subbagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
  - 2.1 rencana strategis;
  - 2.2 rencana kerja;
  - 2.3 rencana kerja tahunan;
  - 2.4 penetapan kinerja; dan
  - 2.5 laporan kinerja;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. mengoordinasikan pembangunan, pengembangan pemeliharaan aplikasi dengan bidang;
- f. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. melaksanakan dan menyampaikan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala

melalui website Perangkat Daerah dan website Pemerintah Daerah;

- h. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- i. mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- j. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- k. melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
- l. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- m. mengoordinir dan meneliti anggaran;
- n. menyusun laporan keuangan Dinas;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- 3. Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi. Bidang Informasi dan Komunikasi melaksanakan fungsi:
  - a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi; perumusan kebijakan bidang informasi komunikasi publik dan statistik;
  - b. pengelolaan data dan informasi publik;
  - c. pengelolaan dan penyediaan konten lintas sektoral;
  - d. pengelolaan media komunikasi publik;
  - e. pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan non pemerintah;
  - f. pelaksanaan pelayanan informasi publik, kehumasan, dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
  - g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
  - h. pelaksanaan pengelolaan media pengaduan publik Pemerintah Daerah;
  - i. pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi utama;
  - j. penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah;

- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Informasi dan Komunikasi terdistribusi atas:

- 1. Seksi Statistik, Persandian, Pos dan Infrastruktur Telekomunikasi, mempunyai tugas:
  - a. menyusun program dan kegiatan Seksi Statistik, Persandian, Pos dan Infrastruktur Telekomunikasi;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang statistik, persandian, pos dan infrastruktur telekomunikasi;
  - c. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data statistik sektoral Pemerintah Daerah;
  - d. menyiapkan bahan publikasi terkait data statistik sektoral;
  - e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral;
  - f. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam peningkatan mutu statistik sektoral Daerah yang terintegrasi;
  - g. melaksanakan pembangunan metadata statistik sektoral;
  - h. melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
  - i. melaksanakan pengembangan infrastruktur statistik sektoral;
  - j. menyelenggarakan otorisasi statistik sektoral di daerah;
  - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan
  - l. pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh
  - n. pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2. Substansi Informasi dan Publikasi, mempunyai tugas:
  - a. menyusun program dan kegiatan Substansi Informasi dan Publikasi;
  - b. menyusun standar operasional dan prosedur layanan informasi dan komunikasi;
  - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi;
  - d. melaksanakan analisa dan pengelolaan data informasi komunikasi publik;

- e. melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta
- f. pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. melaksanakan layanan pemantauan dan evaluasi isu, opini dan
- h. aspirasi publik di media;
- i. mengelola media center dan layanan pengaduan masyarakat;
- j. melaksanakan layanan informasi dan komunikasi lintas sektoral
- k. secara online dan terintegrasi;
- l. menyiapkan laporan berkala perkembangan opini publik;
- m. menyiapkan dan menganalisis bahan rekomendasi tindakan secara tepat waktu kepada pimpinan;
- n. melaksanakan pemantauan informasi dan penetapan agenda
- o. prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
- p. melaksanakan manajemen komunikasi krisis;
- q. menyelenggarakan penyediaan/pengadaan sarana dan
- r. prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
- s. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
- t. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- u. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Substansi Kemitraan dan Komunikasi, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Substansi Kemitraan dan Komunikasi;
- b. menyusun standar operasional dan prosedur layanan kemitraan dan publikasi;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kemitraan dan publikasi;
- d. melaksanakan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas;
- e. melaksanakan kemitraan dengan pemangku kepentingan;

- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyediaan konten lintas sektoral;
- g. menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah;
- h. mengoordinasikan peliputan dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah;
- i. melaksanakan publikasi informasi kegiatan Pemerintah Daerah
- j. melalui media online dan offline;
- k. melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah/media internal;
- l. melaksanakan pembuatan konten lokal dan perencanaan media komunikasi publik;
- m.melaksanakan pengelolaan konten nasional menjadi konten lokal;
- n. melaksanakan pengelolaan media komunikasi publik;
- o. melaksanakan layanan hubungan media;
- p. melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### BIDANG E-GOVERNMENT

- 4. Bidang e-Government mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang e-Government.

Bidang e-Government melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang e-Government;
- b. perumusan kebijakan di bidang infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi, pengelolaan data dan aplikasi, dan pengembangan SPBE, serta persandian;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi, pengelolaan data dan aplikasi, serta pengembangan SPBE dan persandian; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi, pengelolaan data dan aplikasi, serta pengembangan SPBE dan persandian;



- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi, pengelolaan data dan aplikasi, serta pengembangan SPBE dan persandian;
- e. pengaturan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan/atau sejenisnya berupa kabel (wireline) dan/atau nirkabel [wireless];
- f. pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah;
- g. pengoordinasian pendaftaran nama domain Pemerintah Daerah;
- h. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
- i. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- j. pengoordinasian pembangunan, pengembangan pemeliharaan aplikasi dengan perangkat daerah lainnya;
- k. pelaksanaan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi pada pusat data;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan pelaksanaan fungsi lainnya yang dibenarkan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengelompokan substansi Bidang e-Government menyelenggarakan uraian tugas yang terdiri atas:

1. Substansi Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas:
  - a. menyusun program dan kegiatan Substansi Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi;
  - b. menyusun standar operasional dan prosedur layanan infrastruktur dan keamanan informasi;
  - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan infrastruktur dan keamanan informasi;
  - d. menyelenggarakan dan mengembangkan pusat data dan pusat pemulihan data;
  - e. melaksanakan pengawasan dan layanan pengembangan jaringan komunikasi data fiber optic, wireline dan wireless;
  - f. melaksanakan penetapan alokasi internet protokol dan numbering di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - g. melaksanakan pemantauan trafik elektronik;
  - h. melaksanakan keamanan infrastruktur sistem informasi;
  - i. melaksanakan audit infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi;

- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan layanan SPBE;
  - k. menyiapkan bahan perumusan analisa dan pengendalian infrastruktur telekomunikasi;
  - l. melaksanakan pengendalian dan pembinaan jaringan telekomunikasi;
  - m. melaksanakan pembinaan penyeienggaraan telekomunikasi;
  - n. mengoordinasikan bahan rekomendasi, pengawasan dan pemantauan penyeienggaraan jasa internet;
  - o. menyelenggarakan layanan pengelolaan pusat data;
  - p. menyelenggarakan pengelolaan dan pengawasan nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan;
  - q. menyiapkan bahan penetapan tata kelola pendaftaran nama domain, sub domain Pemerintah Daerah;
  - r. menyelenggarakan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah;
  - s. menyelenggarakan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
  - t. melaksanakan operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah;melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - u. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Substansi Data dan Aplikasi, mempunyai tugas:
- a. menyusun program dan kegiatan Substansi Data dan Aplikasi;
  - b. menyusun standar operasional dan prosedur layanan data dan aplikasi;
  - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan data dan pengembangan aplikasi;
  - d. melaksanakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi umum dan khusus yang terintegrasi serta proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
  - e. menyelenggarakan, mengembangkan dan memelihara sistem integrasi layanan publik dan pemerintahan;
  - f. melaksanakan peningkatan kapasitas pemanfaatan sistem informasi pemerintah dan sistem informasi publik;

- g. menyelenggarakan layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan;
  - h. menyelenggarakan layanan interkoneksi layanan publik pemerintahan melalui pusat Application Program Interface (API) Daerah;
  - i. menyelenggarakan layanan pengembangan business process reengineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (stakeholder smartcity);
  - j. menyelenggarakan layanan sistem informasi smartcity, layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
  - k. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan ekosistem smartcity daerah;
  - l. melaksanakan pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi dan sistem informasi;
  - m. mengoordinasikan dan melaksanakan pern bangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan Perangkat Daerah lainnya;
  - n. melaksanakan pengamanan aplikasi pada pusat data;
  - o. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik;
  - p. melaksanakan keamanan informasi pemerintahan Daerah berbasis elektronik;
  - q. menyelenggarakan integrasi pengelolaan teknologi, informasi dan komunikasi serta SPBE Pemerintah Daerah;
  - r. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Substansi Bina e-Government, mempunyai tugas:
- a. menyusun program dan kegiatan Substansi Bina e-Government;
  - b. menyusun standar operasional dan prosedur layanan bina tata kelola SPBE;
  - c. menyelenggarakan penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan, serta pemulihan data dan informasi;
  - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan SPBE;
  - e. menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi bidang SPBE;

- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengelolaan dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan pengembangan sumber daya teknologi, informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- h. melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang teknologi, informasi dan komunikasi;
- i. menyiapkan bahan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi SPBE Daerah;
- j. menyelenggarakan koordinasi kejasama bidang SPBE dengan instansi/lembaga terkait;
- k. melaksanakan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi SPBE dan smartcity;
- l. melaksanakan implementasi SPBE dan smartcity, promosi pemanfaatan layanan smartcity,
- m. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas;
- n. menyelenggarakan penatalaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- o. melaksanakan sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE;
- q. melaksanakan penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah;
- r. melaksanakan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas lainnya yang dibenkan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan saat ini berkedudukan dan menempati kantor dengan alamat Jl. Jend. Sudirman No. 1 RT 13 Kantor Pemerintah Kota Balikpapan, Telepon (0542) 7764388 dan email [diskominfo@balikpapan.go.id](mailto:diskominfo@balikpapan.go.id)

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan memiliki sumber daya

aparatur sebanyak 61 orang, yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara yakni Pegawai Negeri Sipil sebanyak 24 orang, PPPK sebanyak 19 orang dan Non Pegawai Negeri Sipil / Tenaga Bantuan sebanyak 5 orang dan tenaga ahli sebanyak 13 orang. Berdasarkan eselon, jumlah pegawai eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 3 orang dan eselon IV sebanyak 8 orang. Adapun pelaksana yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan berjumlah 13 orang.

Data jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan berdasarkan Eselonisasi dan Golongan. Berikut rincian pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan.

**Tabel 2. 1**  
**Jumlah Pegawai Diskominfo Kota Balikpapan Berdasarkan**  
**Eselon/Pangkat dan Gender Tahun 2025**

No.	URAIAN	Eselon			Golongan							Non Golongan	Gender		Jumlah
		II	III	IV	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	Gol. IX	Gol. VII	Gol. V		L	P	
1	Kepala Dinas	1			1								1		1
2	Sekretaris		0		0										0
3	Kepala Bidang		2		1	1								2	2
4	Kepala Sub Bagian			2		2								2	2
5	Kepala Seksi			1		1							1		1
6	Fungsional Substansi			5		5							3	2	5
7	Pelaksana					10	3					18	19	12	31
8	PPPK								12	3	4		10	9	19
TOTAL													34	27	61

**Tabel 2. 2**  
**Jumlah Pegawai Diskominfo Kota Balikpapan**  
**Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025**

No.	GOLONGAN	SMP	SMA	D3	S1	S2	Jumlah
1	Golongan IV					2	2
2	Golongan III		3	5	10	1	19
3	Golongan II		2	1			3
4	Golongan I						0
5	PPPK		4	3	12		19
6	Naban		1	1	3		5
7	Tenaga Ahli				13		13

Sarana dan prasarana yang digunakan saat ini adalah sarana dan prasarana yang diadakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sepanjang Tahun 2017 – 2025 serta sarana prasarana yang didapat bukan dari pengadaan Dinas Komunikasi dan Informatika sendiri, melainkan pelimpahan/mutasi dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana juga dari Bagian Humas dan Protokol Kota Balikpapan. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan. berikut adalah daftar asset yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan informatika :

**Tabel 2. 3**  
**Daftar Aset Dinas Komunikasi dan Informatika**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI (Rp)		JUMLAH ASET YANG TIDAK DIPAKAI (Rp)		KETERANGAN
		UNIT	Rp	UNIT	Rp	
1	Hardisk	10	14.652.000	-	-	2025
2	Samsung monitor	2	8.402.700	-	-	2025
3	Fortigate firewal	1	197.913.000	-	-	2025
4	aruba instan on AP25	15	74.841.750	-	-	2025
5	CCR2004-16 GB-25+	11	94.566.450	-	-	2025
6	Aruba Instant On1930 48 G 4 SFP	5	130.480.500	-	-	2025
7	Jet stream 24-Port SFP L2	1	19.880.100	-	-	2025
8	Net gear GS308 8 Port	21	47.319.300	-	-	2025
9	NotebookThinkpad X1 Carbon G12 ver 4	5	189.477.000	-	-	2025
10	Notebook Thinkpad T14s Gen 5	1	24.952.800	-	-	2025
11	Dekstop TC M90t Gen 5 Ver 2	6	227.372.400	-	-	2025
12	Hardisk Eksternal	3	10.200.000	-	-	baik
13	Video Trone	6	11.928.000.000	-	-	baik
14	HP ANDROID	1	7.500.000	-	-	baik
15	SMART PHONE	1	77.418.060	-	-	baik
16	Digital Camera	3	146.700.000	-	-	baik
17	Lensa	1	22.900.000	-	-	baik
18	Lighting Stand	2	2.300.000	-	-	baik
19	Mirrorglas camera body only	1	65.500.000	-	-	baik
20	tripod kamera	3	11.700.000	-	-	baik
21	converter lensa	1	1.250.000	-	-	baik
22	lampu flash camera	1	1.800.000	-	-	baik
23	stabilizer camera	2	44.400.000	-	-	baik

NO	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI (Rp)		JUMLAH ASET YANG TIDAK DIPAKAI (Rp)		KETERANGAN
		UNIT	Rp	UNIT	Rp	
24	Laptop editing Vid & desain	2	149.184.000	-	-	baik
25	Laptop Teknis	4	158.286.000	-	-	baik
26	Hardisk Server	8	113.042.400	-	-	baik
27	Memory server	4	37.518.000	-	-	baik
28	Switch managed 24 port	7	101.787.000	-	-	baik
29	PC Dekstop Teknis	3	71.595.000	-	-	baik
30	Mikrotik RB 1100	4	24.730.800	-	-	baik
31	Switch managed 48 Port	9	223.276.500	-	-	baik
32	Switch SFP	2	38.101.860	-	-	baik
33	pengembangan data warehouse	1	96.348.000	-	-	baik
34	aset tidak berwujud-software-pengembangan modul balikpapan single window	1	99.123.000	-	-	baik
35	Hand Phone	1	8.103.000	-	-	baik
36	Laptop	1	15.606.600	-	-	baik
37	Laptop	1	34.798.500	-	-	baik
38	Air Conditioner (AC)	7	55.555.500	-	-	baik
39	Kursi	5	4.375.000	-	-	baik
40	Lemari	2	2.900.000	-	-	baik
41	Rak arsip	3	2.700.000	-	-	baik
42	Vacum Cleaner	1	1.600.000	-	-	baik
43	Sepeda Motor	1	10.100.000			baik
44	Kendaraan Roda 4	1	116.350.000			Suzuki ST 150/Proses pengembalian (Rusak berat)
45	Kendaraan Roda 4	1	114.270.000			Fraksi Demokrat
46	Kendaraan Roda 4	1	114.300.000			Hilux Pickup (Proses pengembalian ke BKAD)
47	Kendaraan Roda 4	1	390.000.000			Hilux Double kabin
48	Kendaraan Roda 4	1	180.723.000			Toyota veloz
49	Kendaraan Roda 4	1	246.100.000			Innova
50	Sepeda Motor	1	25.500.000			Honda Vario
51	Kendaraan Roda 4	1	411.500.000			Hilux Pickup Double kabin

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Diskominfo Kota Balikpapan terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tahun 2016

dengan Uraian Tugas dan Fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Urusan Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari sub urusan informasi dan komunikasi publik serta aplikasi informatika. Selanjutnya Diskominfo Kota Balikpapan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan di bidang Statistik, dan urusan pemerintahan di bidang Persandian.

Pada Renstra sebelumnya yakni tahun 2021 – 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2026 terdapat 5 (lima) program yakni 4 (empat) program urusan dan 1 (satu program penunjang). Dari kelima program tersebut telah dirumuskan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama Diskominfo Kota Balikpapan disusun berdasarkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi, serta berdasarkan pada sasaran strategis dengan menetapkan indikator kinerja pada semua program dan kegiatan yang direncanakan, tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya dapat dimonitor dan dievaluasi. Selanjutnya hasil dari evaluasi ini akan menjadi indikator keberhasilan dan sasaran tujuan dan sasaran instansi. Capaian tujuan dan sasaran kota dihasilkan dari tujuan dan sasaran OPD yang telah selaras dengan RPJMD Kota Balikpapan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU), target kinerja dan realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021 - 2026 adalah:

**Tabel 2. 4**  
**Target dan Realisasi IKU Diskominfo Tahun 2021 - 2026**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025	
		T	R	T	R	T	R	T	R
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Nilai Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	87	87	88	95.16	89	94.64	90	-
Meningkatnya Pencapaian Peta	Indeks Domain Kebijakan SPBE	2.45	3.1	2.6	4.60	2.8	4.50	3.0	-



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025	
		T	R	T	R	T	R	T	R
Rencana Arsitektur SPBE Kota Balikpapan	Indeks Domain Layanan SPBE	3.5	3.82	3.70	4.07	3.75	4.32	3.80	-
	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	3.1	2.6	3.3	3.70	3.5	3.90	3.7	-
	Indeks Domain Manajemen SPBE	2	1.55	2.1	2.27	2.3	2.64	2.4	-
Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	31	34.26	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Diskominfo	65	68.12	65.5	70.38	66	74.26	66.50	75.18

Dari Tabel diatas terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama yakni dari Nilai Reformasi Birokrasi menjadi Nilai SAKIP Perangkat Daerah, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 terdapat reviu dan perubahan IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan yang berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 dan hasil rekomendasi hasil evaluasi AKIP Kota Balikpapan Tahun 2023 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Nomor : 188.46/1222/M/DISKOMINFO tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Nomor : 188.46-14/DISKOMINFO/2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026.

Selain Indikator Kinerja Utama, kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan juga dapat diukur pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan

Persandian. Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam pemerintahan adalah ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang digunakan untuk mengukur pencapaian target, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. IKK menjadi bagian penting dalam dokumen perencanaan, seperti Rencana Strategis Perangkat Daerah dan digunakan untuk memantau serta mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Dengan menggunakan IKK, pemerintah dapat memastikan bahwa tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Adapun capaian dari IKK Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan pada periode renstra tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 5**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci**

No.	Indikator	Target			Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Realisasi Capaian				
		NSPK	IKK	Indikator Lainnya	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10	9	10
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		✓		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		✓		80%	80%	80%	80%	80%	54%	83,50%	83,50%	-	-	68%	104,37%	104,37%	-	-
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota		✓		80%	80%	80%	80%	80%	65%	71%	86%	-	-	81%	89%	108%	-	-
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		✓		80%	80%	85%	90%	90%	100%	100%	100%	-	-	125%	125%	118%	-	-
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		✓		20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%	79%	-	-	500%	500%	397%	-	-
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah		✓		80%	80%	80%	80%	80%	N/A	35%	38%	-	-	N/A	44%	47%	-	-

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok sasaran merupakan sekelompok orang atau organisasi yang menjadi target utama dari suatu program, kampanye, atau pesan tertentu. Pada Diskominfo Kota Balikpapan yang menjadi kelompok sasaran adalah seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, elemen masyarakat yang membutuhkan informasi dan layanan komunikasi, termasuk masyarakat umum, media massa, kelompok informasi masyarakat, dan berbagai organisasi atau instansi terkait.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui saluran informasi Pemerintah Kota Balikpapan sebagai alat diseminasi konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemerintah Daerah. Saat ini saluran informasi Pemerintah Kota Balikpapan yang dikelola oleh Diskominfo Kota Balikpapan yakni melalui portal <http://balikpapan.go.id>, media sosial yaitu, Facebook <http://www.facebook.com/pemkotbpn>, instagram @pemkot\_balikpapan, twitter @PemkotBPN, layanan SMS dan Whatsapp 08115440542. Selain media sosial, Pemerintah Kota Balikpapan juga memiliki Layanan Balikpapan 112, yaitu sebuah nomor tunggal panggilan darurat yang dapat dimanfaatkan oleh warga saat terjadi keadaan darurat, seperti kebakaran, bantuan evakuasi medis, dan tindakan kejahatan. Selain itu pada sub urusan Aplikasi Informatika juga menyelenggarakan koneksi internet gratis di fasilitas umum yakni pada tahun 2023 sebanyak 287 titik, tahun 2024 sebanyak 185 titik dan pada tahun 2025 sebanyak 362 titik.

#### **2.1.5 Mitra Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Diskominfo Kota Balikpapan membutuhkan dukungan dari pihak lain sebagai mitra, adapun mitra dari Diskominfo Kota Balikpapan adalah :

1. Kementrian Komunikasi dan Digital;
2. Badan Siber dan Sandi Negara;
3. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
4. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;
5. Komisi Informasi;
6. Badan Pusat Statistik;
7. Media Massa baik Media Cetak, Media Elektronik, Media Online baik lokal maupun nasional;

8. Asosiasi atau Organisasi yang menaungi media di Kota Balikpapan.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah**

Analisis permasalahan merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Perumusan permasalahan Diskominfo Kota Balikpapan diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi perangkat daerah di masa lima tahun mendatang. Merujuk kepada hasil analisis permasalahan pembangunan daerah per-urusan pemerintahan pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029, maka terdapat permasalahan terkait Diskominfo Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

9. Belum optimalnya pelaksanaan standar layanan informasi publik di badan publik lingkungan pemerintah Kota Balikpapan;
10. Belum optimalnya integrasi layanan digital yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan;
11. Belum optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan pemerintahan digital untuk mendukung terwujudnya Smart City;
12. Kurangnya SDM serta Belum optimalnya peningkatan kapasitas SDM pengelola TIK, Informasi Komunikasi, Statistik dan Keamanan Informasi;
13. Belum Optimalnya penguatan tata kelola data statistik terintegrasi untuk menurunkan angka kemiskinan dan angka stunting;
14. Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral melalui portal satu data untuk perencanaan pembangunan daerah;
15. Belum optimalnya kepedulian pengguna terhadap keamanan perangkat TIK yang digunakan
16. Belum optimalnya kepedulian pemilik layanan digital terhadap kewan aman sistem aplikasinya;
17. Belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan informasi.

### **2.2.2 Isu Strategis**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Diskominfo Kota Balikpapan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Rencana lima tahun ke depan Diskominfo Kota Balikpapan sangat ditentukan dari analisis isu-isu strategisnya. Analisis isu-isu strategis ini dilakukan untuk melengkapi tahap-tahap sebelumnya dalam penyusunan Renstra Diskominfo Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029. Sasaran dan program pembangunan ditentukan dari identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis. Mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan yang terjadi adalah langkah dalam memperoleh isu strategis.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan maka dirumuskan beberapa isu strategis Diskominfo Kota Balikpapan 2025- 2029 yang telah disesuaikan dengan lingkungan dinamis (global, nasional dan regional):

**Tabel 2. 6**  
**Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota Balikpapan sebagai Mitra IKN dapat menjadi potensi pengembangan Smart City	Belum optimalnya pelaksanaan standar layanan informasi publik di badan publik lingkungan pemerintah Kota Balikpapan;	Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap mitigasi bencana	Keamanan Siber, Privasi dan Perlindungan Data	Perubahan sistem pengukuran Transformasi Digital Nasional dari SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	Kerjasama antar Daerah dalam Sektor TIK	Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik belum menjadi perhatian Perangkat Daerah
	Belum optimalnya integrasi layanan digital yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan				Keterjangkauan akses internet	Belum terintegrasinya data dan aplikasi antar perangkat daerah
	Belum optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan pemerintahan digital untuk mendukung terwujudnya Smart City;					Belum optimalnya koordinasi Dewan Smart City Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kurangnya SDM serta Belum optimalnya peningkatan kapasitas SDM pengelola TIK, Informasi Komunikasi, Statistik dan Keamanan Informasi					Perangkat Daerah produsen data belum berbagipakai data statistik terintegrasi untuk menurunkan angka kemiskinan dan angka stunting
	Belum Optimalnya penguatan tata kelola data statistik terintegrasi untuk menurunkan angka kemiskinan dan angka stunting;					Pengumpulan data masih terkendala pada produsen data yang belum perhatian pada pentingnya data statistik
	Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral melalui portal satu data untuk perencanaan pembangunan daerah;					Keterbatasan literasi keamanan informasi bagi ASN dan masyarakat



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Belum optimalnya kepedulian pengguna terhadap keamanan perangkat TIK yang digunakan					Urusan persandian dan keamanan informasi belum menjadi fokus dalam pelaksanaan pemerintahan
	Belum optimalnya kepedulian pemilik layanan digital terhadap kemanan sistem aplikasinya					
	Belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan informasi;					

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah**

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Renstra Diskominfo Kota Balikpapan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan harus sejalan dengan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan tahun 2025 - 2029 adalah **“Meningkatnya Kualitas Digitalisasi Layanan Publik”**

##### **3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Untuk mengetahui lebih jelas tujuan dan sasaran jangka menengah Diskominfo Kota Balikpapan beserta indikatornya untuk tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Diskominfo Pemerintah Kota Balikpapan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(11)	(12)
2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
- Pelayanan publik yang semakin prima dan adaptif transformasi digital	Meningkatnya Kualitas Digitalisasi Layanan Publik		Indeks Literasi Digital (Indeks)	-	-	3,6	3,7	3,8	3,9	4	
		Meningkatnya kepuasan pengguna layanan digital Pemerintah Kota Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Digital Pemerintah (Indeks)	-	60	62,5	65	70	75	80	
		Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	94,64	94,65	94,66	94,68	94,7	94,85	95	
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	74,26	75,18	76,00	77,00	77,50	78,00	78,50	
		Meningkatnya kematangan pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,23	2,23	2,28	2,33	2,38	2,43	2,48	

### **3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Hal tersebut diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Diskominfo Kota Balikpapan dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan untuk mencapai tujuan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah Daerah, pada ketentuan umum pasal 1, disebutkan bahwa Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Adapun Strategi Diskominfo Kota Balikpapan :

1. Digitalisasi dan Integrasi Layanan Publik;
2. Pengembangan infrastruktur digital;
3. Penguatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik,
4. Integrasi data dan layanan;
5. Peningkatan keamanan data.

Secara keseluruhan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat dalam penahapan Renstra tahun 2025 – 2029, adapun penahapan tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 2**  
**Penahapan Renstra Diskominfo Tahun 2025 – 2029**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN URUSAN PERSANDIAN</b>				
Review regulasi atau SOP Layanan Informasi Publik	pengembangan portal ataupun aplikasi layanan PPID sehingga website ppid harus aktif dan update	publikasi informasi yang wajib diumumkan sesuai standar dan pelayanan keberatan terselesaikan sesuai SOP	monitoring dan evaluasi kinerja PPID	kolaborasi publik dan media
bimbingan teknis/pelatihan dasar sehingga SDM paham tugas PPID	publikasi dan sosialisasi layanan permohonan informasi publik	monitoring internal	penguatan koordinasi	publikasi dan sosialisasi layanan Keterbukaan informasi publik
Sosialisasi bagi ketua PPID di seluruh perangkat Daerah sehingga PPID di perangkat daerah aktif	bimbingan teknis/pelatihan dasar sehingga SDM paham tugas PPID	bimbingan teknis/pelatihan dasar sehingga SDM paham tugas PPID	pelatihan berkelanjutan	kolaborasi dan koordinasi internal untuk meningkatkan nilai keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi
			Pengembangan Kebijakan	pelatihan berkelanjutan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan infrastruktur jaringan internet yang cepat dan stabil diseluruh wilayah Kota Balikpapan termasuk daerah-daerah yang sulit dijangkau;</li> <li>- Penguatan Pusat Kendali dan Infrastruktur Cloud untuk efisiensi dalam penyimpanan dan pengelolaan data pemerintah, serta memperkuat pusat data nasional;</li> <li>- Interoperabilitas Sistem Pemerintah untuk mempermudah pertukaran data antar instansi secara aman dan efisien;</li> <li>- Pendidikan keamanan siber bagi ASN;</li> <li>- Menyempurnakan digitalisasi proses bisnis Pemerintah untuk mempercepat pelayanan dan pengambilan keputusan;</li> <li>- Evaluasi kinerja sistem pemerintahan digital;</li> <li>- Penyusunan masterplan smart city tahun 2027 - 2030;</li> <li>- Penyusunan peta rencana SPBE tahun 2026 - 2030</li> <li>- Penyempurnaan arsitektur SPBE dari To-Be menjadi As-Is</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Sistem Layanan Digital Terpadu;</li> <li>- Penguatan keamanan siber (cybersecurity) dengan memanfaatkan teknologi AI dan marchine learning untuk mendeteksi dan merespons potensi serangan secara real time;</li> <li>- Peningkatan pelatihan dan kesadaran keamanan digital untuk seluruh pegawai pemerintah serta masyarakat agar lebih memahami pentingnya perlindungan data dan identitas digital;</li> <li>- Sistem manajemen data terpadu;</li> <li>- Kebijakan daerah tentang Kota Cerdas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyempurnakan kebijakan perlindungan data pribadi dalam pemerintahan digital, mengadopsi regulasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat;</li> <li>- Implementasi kecerdasan buatan (AI) dalam layanan publik;</li> <li>- Big Data dan Analitik untuk pengambilan keputusan;</li> <li>- IoT untuk pengelolaan kota cerdas (smart city);</li> <li>- Evaluasi kinerja sistem pemerintahan digital</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyempurnaan implementasi kecerdasan buatan (AI) dalam layanan publik;</li> <li>- Penyempurnaan Big Data dan Analitik untuk pengambilan keputusan;</li> <li>- Penyempurnaan IoT untuk pengelolaan kota cerdas (smart city);</li> <li>- Peningkatan budaya kerja digital bagi pegawai pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan platform partisipasi masyarakat digital yang terintegrasi;</li> <li>- Inovasi berkelanjutan mengikuti perkembangan tren teknologi baru;</li> <li>- Evaluasi kinerja sistem pemerintahan digital;</li> <li>- Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui kota cerdas.</li> </ul>

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>URUSAN STATISTIK</b>				
<b>Penataan Internal</b>	<b>Digitalisasi dan penguatan Infrastruktur</b>	<b>Integrasi antar layanan pemerintahan</b>	<b>Evaluasi dan penguatan berkelanjutan</b>	<b>inovasi, kolaborasi, dan budaya transparansi</b>
review regulasi atau SOP terkait Statistik/Satu Data	pengembangan portal satu data sehingga bisa digunakan untuk bagi pakai data dengan perangkat daerah	Integrasi dan berbagi pakai informasi statistik antar layanan pemerintahan	verifikasi dan validasi data informasi antar layanan pemerintahan	kolaborasi dengan pihak vertikal
bimbingan teknis/pelatihan dasar	publikasi dan sosialisasi layanan portal data balikan	monitoring internal	evaluasi hasil bimbingan teknis/pelatihan dasar kegiatan statistik	publikasi dan deseminasi kegiatan statistik
Sosialisasi bagi Produsen data pada perangkat Daerah	bimbingan teknis/pelatihan dasar	pembinaan dalam bidang statistik	pelatihan berkelanjutan	pelatihan berkelanjutan
pembinaan dalam bidang statistik	pembinaan dalam bidang statistik	bimbingan teknis/pelatihan dasar	revisi kebijakan jika diperlukan	evaluasi seluruh kegiatan statistik (pengumpulan, verval dan penyebarluasan data)

**3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah**

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka berpikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan kebijakan Diskominfo Kota Balikpapan merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Diskominfo Kota Balikpapan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Adapun Arah Kebijakan Diskominfo Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 3**  
**Arah Kebijakan Diskominfo Tahun 2025 - 2029**

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
1	2	3	4	5
	Pelayanan publik yang semakin prima dan adaptif transformasi digital	Pembangunan Ekosistem Digital	Peningkatan literasi digital	
	Pengelolaan Informasi, Komunikasi, Statistik dan Persandian Daerah	Penguatan Literasi Masyarakat	Meningkatkan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	
			Meningkatan keamanan siber, data pribadi dan Informasi	
			Optimalisasi Pengelolaan Data dan Statistik	

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1 Uraian Program**

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Rencana program Diskominfo Kota Balikpapan yang akan dan harus dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029.

Kegiatan dalam Renstra merupakan langkah-langkah operasional yang akan diambil untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Renstra biasanya memuat kegiatan-kegiatan yang dianggap paling penting dan strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap kegiatan dalam Renstra sebaiknya memiliki indikator kinerja yang jelas agar pencapaiannya dapat diukur dan dievaluasi. Tujuan utama dari kegiatan-kegiatan ini adalah untuk menghasilkan dampak positif dan mencapai hasil yang telah direncanakan. Adapun Program dan Kegiatan dalam Renstra Diskominfo 2025 – 2029 adalah:

- I. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
  1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - 1.1 Relasi Media
    - 1.2 Pelayanan Informasi Publik
    - 1.3 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
    - 1.4 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
    - 1.5 Diseminasi Informasi
    - 1.6 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
    - 1.7 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
    - 1.8 Penyusunan Konten
    - 1.9 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
- II. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
  1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - 1.1 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
  2. Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



- 2.1 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
- 2.2 Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE
- 2.3 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
- 2.4 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
- 2.5 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
- 2.6 Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
- 2.7 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
- 2.8 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE
- 2.9 Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
- 2.10 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
- 2.11 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi

### III. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- 1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.1 Pemenuhan Prinsip Satu data Indonesia
  - 1.2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
  - 1.3 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
  - 1.4 Koordinasi dan Kolaborasi dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral

### IV. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman Informasi

- 2. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.1 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
  - 1.2 Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan
  - 1.3 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
  - 1.4 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

## V. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 3.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
  - 3.2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  - 3.3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - 3.4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 4.3 Penyediaan bahan logistik Kantor
  - 4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 4.5 Fasilitas Kunjungan Tamu
  - 4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 4.7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - 4.8 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 5.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 5.3 Pengadaan Mebel
  - 5.4 Pengadaan Aset Tak Berwujud
  - 5.5 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 4. 1  
Program Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					64.536.286.855		48.033.000.000		49.841.396.000		50.881.684.000		52.045.455.000	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					31.029.928.108		13.409.000.000		13.892.000.000		13.892.000.000		14.099.000.000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	87,08	87	87,2	31.029.928.108	87,5	13.409.000.000	87,7	13.892.000.000	87,9	13.892.000.000	88	14.099.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					16.480.322.137		15.624.000.000		16.879.396.000		18.204.684.000		18.551.455.000	
Meningkatnya jangkauan komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	86	86,2	86,5	16.480.322.137	86,7	15.624.000.000	86,9	16.879.396.000	87	18.204.684.000	87,2	18.551.455.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					17.026.036.610		19.000.000.000		19.070.000.000		18.785.000.000		19.395.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya jumlah layanan digital terintegrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan digital	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi (%)	85	85,5	86	17.026.036.610	86,5	19.000.000.000	87	19.070.000.000	88	18.785.000.000	89	19.395.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					980.450.000		1.104.520.000		1.223.000.000		1.244.000.000		1.554.000.000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					980.450.000		1.104.520.000		1.223.000.000		1.244.000.000		1.554.000.000	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Melakukan Publikasi Data Statistik yang Menerapkan Standar Akurasi yang Dimanfaatkan Sebagai Dasar Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (%)	17,64	23,52	29,41	980.450.000	35,29	1.104.520.000	41,17	1.223.000.000	47,05	1.244.000.000	52,94	1.554.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					980.000.000		1.400.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.150.000.000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					980.000.000		1.400.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.150.000.000	
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	37,83	37,83	38,76	980.000.000	40,31	1.400.000.000	40,31	2.000.000.000	41,09	2.000.000.000	41,09	2.150.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
TOTAL KESELURUHAN					66.496.736.855		50.537.520.000		53.064.396.000		54.125.684.000		55.749.455.000	

**Tabel 4. 2**

**Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Akhir Renstra Diskominfo**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>							
- Pelayanan publik yang semakin prima dan adaptif transformasi digital	Meningkatnya Kualitas Digitalisasi Layanan Publik				Indeks Literasi Digital (Indeks)		
		Meningkatnya kepuasan pengguna layanan digital Pemerintah Kota Balikpapan			Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Digital Pemerintah (Indeks)		
			Meningkatnya jumlah layanan digital terintegrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan digital		Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi (%)	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Meningkatnya Jumlah aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah secara daring yang memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
				Meningkatnya Jumlah Layanan Digital Pemerintah Kota Balikpapan yang telah terdaftar Sistem Elektronik lingkup Publik	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	
					Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	2.16.03.2.02.0026 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
					Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
					Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	
					Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
					Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	2.16.03.2.02.0039 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	
			Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah		Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
				Meningkatnya Jumlah Layanan Digital yang sesuai dengan Indikator Indeks Keamanan Informasi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
					Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
		Meningkatnya keterbukaan informasi publik			Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)		
			Meningkatnya jangkauan komunikasi publik pemerintah daerah		Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				Meningkatnya jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi di dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	
					Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	2.16.02.2.01.0018 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
					Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
					Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten	
					Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terwujudnya profesionalisme aparaturnya perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2.16.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.16.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.16.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.16.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terwujudnya layanan umum perkantoran perangkat daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.16.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terwujudnya operasional umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya kematangan pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral			Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)		
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		Persentase Perangkat Daerah yang Telah Melakukan Publikasi Data Statistik yang Menerapkan Standar Akurasi yang Dimanfaatkan Sebagai Dasar Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (%)	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
				Meningkatnya Jumlah Data Statistik yang disusun oleh perangkat daerah melalui Portal Satu Data	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
					Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
					Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	

#### **4.2 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, Target dan Pagu Kegiatan**

Sub kegiatan merupakan bagian integral dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra dimana sub kegiatan merupakan langkah-langkah operasional yang lebih detail dari suatu kegiatan. Sub kegiatan dirancang untuk mendukung pencapaian keluaran atau hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan. Setiap sub kegiatan memiliki peran spesifik dalam mencapai tujuan yang lebih besar. Pelaksanaan sub kegiatan memerlukan sumber daya tertentu, seperti anggaran, tenaga kerja, dan fasilitas. Sumber daya ini perlu dialokasikan secara efektif untuk memastikan sub kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. Berikut adalah uraian Program, Kegiatan, Sub kegiatan beserta indikator, terget dan pagu kegiatan pada Renstra Diskominfo tahun 2025 – 2029 :



Tabel 4. 3

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				64.536.286.855		48.033.000.000		49.841.396.000		50.881.684.000		52.045.455.000		
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				31.029.928.108		13.409.000.000		13.892.000.000		13.892.000.000		14.099.000.000		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	87,08	87,2	31.029.928.108	87,5	13.409.000.000	87,7	13.892.000.000	87,9	13.892.000.000	88	14.099.000.000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				69.150.000		60.000.000		65.000.000		65.000.000		170.000.000		
Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	69.150.000	2	60.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	170.000.000		
2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				69.150.000		60.000.000		65.000.000		65.000.000		170.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	69.150.000	2	60.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	170.000.000		
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.795.928.008		8.200.000.000		8.200.000.000		8.200.000.000		8.200.000.000		
Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	31	50	7.795.928.008	55	8.200.000.000	55	8.200.000.000	55	8.200.000.000	55	8.200.000.000		
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.795.928.008		8.200.000.000		8.200.000.000		8.200.000.000		8.200.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	31	50	7.795.928.008	55	8.200.000.000	55	8.200.000.000	55	8.200.000.000	55	8.200.000.000		
2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				661.500.000		541.000.000		546.000.000		546.000.000		646.000.000		
Terwujudnya profesionalisme aparatur perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	10	661.500.000	10	541.000.000	10	546.000.000	10	546.000.000	10	646.000.000		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	55				55				55			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	54	55				55				55			
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	4				2				2			
2.16.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				31.500.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	4	31.500.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000		
2.16.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				30.000.000		35.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	55	30.000.000	55	35.000.000	55	40.000.000	55	40.000.000	55	40.000.000		
2.16.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				500.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		500.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	54	55	500.000.000	55	400.000.000	55	400.000.000	55	400.000.000	55	500.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100.000.000		66.000.000		66.000.000		66.000.000		66.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	10	100.000.000	10	66.000.000	10	66.000.000	10	66.000.000	10	66.000.000		
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.567.350.100		1.685.000.000		1.938.000.000		1.938.000.000		1.940.000.000		
Terwujudnya layanan umum perkantoran perangkat daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	1.567.350.100	1	1.685.000.000	1	1.938.000.000	1	1.938.000.000	1	1.940.000.000		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	45	30		35		40		40		40			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	7		7		7		7		7			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	7		7		7		7		7			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	10.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				468.000.000		600.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	7	468.000.000	7	600.000.000	7	700.000.000	7	700.000.000	7	700.000.000		
2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				350.000.000		400.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	7	350.000.000	7	400.000.000	7	450.000.000	7	450.000.000	7	450.000.000		
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.000.000		50.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	55.000.000	2	55.000.000	2	55.000.000		
2.16.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				70.000.000		30.000.000		33.000.000		33.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	70.000.000	1	30.000.000	1	33.000.000	1	33.000.000	1	35.000.000		
2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				469.350.000		450.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	45	30	469.350.000	35	450.000.000	40	500.000.000	40	500.000.000	40	500.000.000		
2.16.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				45.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	45.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				105.000.100		110.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	105.000.100	1	110.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				19.045.000.000		1.300.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		
Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	19.045.000.000	2	1.300.000.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	6		8		7		7		7			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	5		6		6		6		6			
2.16.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				645.000.000		700.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	5	645.000.000	6	700.000.000	6	800.000.000	6	800.000.000	6	800.000.000		
2.16.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				400.000.000		500.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	6	400.000.000	8	500.000.000	7	600.000.000	7	600.000.000	7	600.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000		
2.16.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.000.000.000		0		0		0		0		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	18.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.303.000.000		1.003.000.000		1.003.000.000		1.003.000.000		1.003.000.000		
Terwujudnya operasional umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.303.000.000	1	1.003.000.000	1	1.003.000.000	1	1.003.000.000	1	1.003.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1					
2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000		
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				250.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	250.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.000.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.000.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000		
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				588.000.000		620.000.000		640.000.000		640.000.000		640.000.000		
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar berfungsi optimal	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	6	588.000.000	9	620.000.000	9	640.000.000	9	640.000.000	9	640.000.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	8		6		6		6		6			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	24	24		40		50		50		50			
2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	8	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000		
2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				278.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	6	278.000.000	9	300.000.000	9	300.000.000	9	300.000.000	9	300.000.000		
2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		50.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	24	24	40.000.000	40	50.000.000	50	60.000.000	50	60.000.000	50	60.000.000		
2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				16.480.322.137		15.624.000.000		16.879.396.000		18.204.684.000		18.551.455.000		
Meningkatnya jangkauan komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	86	86,5	16.480.322.137	86,7	15.624.000.000	86,9	16.879.396.000	87	18.204.684.000	87,2	18.551.455.000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN				
			2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				16.480.322.137		15.624.000.000		16.879.396.000		18.204.684.000		18.551.455.000						
Meningkatnya jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	47	49	16.480.322.137	49	15.624.000.000	49	16.879.396.000	49	18.204.684.000	49	18.551.455.000						
	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	719	1.000				1.020				1.040					1.060		1.100
	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	72	0				89				89					89		89
	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	-	6				6				6					6		6
	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	-	1				1				1					1		1
	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	-	0				65				70					75		80
	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	-	0				65				70					75		80
	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	1	1				1				1					1		1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	14	6		6		6		6		6			
2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media				150.000.000		173.000.000		230.000.000		230.000.000		265.000.000		
Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	-	1	150.000.000	1	173.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000	1	265.000.000		
2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik				215.000.000		248.000.000		328.000.000		328.000.000		378.000.000		
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	14	6	215.000.000	6	248.000.000	6	328.000.000	6	328.000.000	6	378.000.000		
2.16.02.2.01.0018 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				0		173.000.000		198.000.000		228.000.000		263.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	-	0	0	65	173.000.000	70	198.000.000	75	228.000.000	80	263.000.000		
2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik				1.362.000.000		1.362.000.000		1.699.396.000		1.600.000.000		1.600.000.000		
Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	-	6	1.362.000.000	6	1.362.000.000	6	1.699.396.000	6	1.600.000.000	6	1.600.000.000		
2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi				0		173.000.000		198.000.000		228.000.000		263.000.000		
Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	-	0	0	65	173.000.000	70	198.000.000	75	228.000.000	80	263.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik				9.259.000.000		10.000.000.000		10.500.000.000		11.434.684.000		11.523.455.000		
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	47	49	9.259.000.000	49	10.000.000.000	49	10.500.000.000	49	11.434.684.000	49	11.523.455.000		
2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik				2.000.000.000		265.000.000		305.000.000		351.000.000		404.000.000		
Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	1	1	2.000.000.000	1	265.000.000	1	305.000.000	1	351.000.000	1	404.000.000		
2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten				3.494.322.137		3.000.000.000		3.160.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		
Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	719	1.000	3.494.322.137	1.020	3.000.000.000	1.040	3.160.000.000	1.060	3.500.000.000	1.100	3.500.000.000		
2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik				0		230.000.000		261.000.000		305.000.000		355.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	72	0	0	89	230.000.000	89	261.000.000	89	305.000.000	89	355.000.000		
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				17.026.036.610		19.000.000.000		19.070.000.000		18.785.000.000		19.395.000.000		
Meningkatnya jumlah layanan digital terintegrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan digital	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi (%)	85	86	17.026.036.610	86,5	19.000.000.000	87	19.070.000.000	88	18.785.000.000	89	19.395.000.000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				320.000.000		350.000.000		360.000.000		370.000.000		380.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Jumlah aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah secara daring yang memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	-	1	320.000.000	1	350.000.000	1	360.000.000	1	370.000.000	1	380.000.000		
2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa				320.000.000		350.000.000		360.000.000		370.000.000		380.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	-	1	320.000.000	1	350.000.000	1	360.000.000	1	370.000.000	1	380.000.000		
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				16.706.036.610		18.650.000.000		18.710.000.000		18.415.000.000		19.015.000.000		
Meningkatnya Jumlah Layanan Digital Pemerintah Kota Balikpapan yang telah terdaftar Sistem Elektronik lingkup Publik	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	-	1	16.706.036.610	1	18.650.000.000	1	18.710.000.000	1	18.415.000.000	1	19.015.000.000		
	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	34	34		34		34		34					
	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	34	34		34		34		34					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	2	0		7		8		9		10			
	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	10	15		15		17		17		19			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional				0		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	2	0	0	7	40.000.000	8	40.000.000	9	40.000.000	10	40.000.000		
2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				14.812.350		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	-	1	14.812.350	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				6.500.000.000		2.668.632.000		2.668.632.000		2.668.632.000		2.668.632.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	34	34	6.500.000.000	34	2.668.632.000	34	2.668.632.000	34	2.668.632.000	34	2.668.632.000		
2.16.03.2.02.0026 - Fasilitas penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				58.414.940		110.000.000		110.000.000		115.000.000		115.000.000		
Terlaksananya Fasilitas penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	-	1	58.414.940	1	110.000.000	1	110.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000		
2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE				1.000.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.250.000.000		1.300.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	10	15	1.000.000.000	15	1.200.000.000	17	1.200.000.000	17	1.250.000.000	19	1.300.000.000		
2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah				5.000.000.000		3.000.000.000		2.500.000.000		2.000.000.000		2.500.000.000		
Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	-	1	5.000.000.000	1	3.000.000.000	1	2.500.000.000	1	2.000.000.000	1	2.500.000.000		
2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				166.520.350		450.000.000		500.000.000		650.000.000		700.000.000		
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	-	1	166.520.350	1	450.000.000	1	500.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000		
2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet				0		5.831.368.000		5.831.368.000		5.831.368.000		5.831.368.000		
Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	34	34	0	34	5.831.368.000	34	5.831.368.000	34	5.831.368.000	34	5.831.368.000		
2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				462.413.320		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	-	1	462.413.320	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000		
2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas				3.143.625.650		4.500.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	1	1	3.143.625.650	1	4.500.000.000	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000		
2.16.03.2.02.0039 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi				360.250.000		375.000.000		385.000.000		385.000.000		385.000.000		
Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	1	1	360.250.000	1	375.000.000	1	385.000.000	1	385.000.000	1	385.000.000		
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				980.450.000		1.104.520.000		1.223.000.000		1.244.000.000		1.554.000.000		
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				980.450.000		1.104.520.000		1.223.000.000		1.244.000.000		1.554.000.000		
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Melakukan Publikasi Data Statistik yang Menerapkan Standar Akurasi yang Dimanfaatkan Sebagai Dasar Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (%)	17,64	29,41	980.450.000	35,29	1.104.520.000	41,17	1.223.000.000	47,05	1.244.000.000	52,94	1.554.000.000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				980.450.000		1.104.520.000		1.223.000.000		1.244.000.000		1.554.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Jumlah Data Statistik yang disusun oleh perangkat daerah melalui Portal Satu Data	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	-	70	980.450.000	73	1.104.520.000	76	1.223.000.000	79	1.244.000.000	81	1.554.000.000		
	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	-	2		2		2		2					
	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	68	68		68		70		70		70			
	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	-	100		100		100		100		100			
2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia				259.000.000		235.000.000		235.000.000		241.000.000		426.000.000		
Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	-	70	259.000.000	73	235.000.000	76	235.000.000	79	241.000.000	81	426.000.000		
2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				500.000.000		634.520.000		750.000.000		762.000.000		877.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	68	68	500.000.000	68	634.520.000	70	750.000.000	70	762.000.000	70	877.000.000		
2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar				175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		
Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	-	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral				46.450.000		60.000.000		63.000.000		66.000.000		76.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	-	2	46.450.000	2	60.000.000	2	63.000.000	2	66.000.000	2	76.000.000		
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				980.000.000		1.400.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.150.000.000		
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				980.000.000		1.400.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.150.000.000		
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	37,83	38,76	980.000.000	40,31	1.400.000.000	40,31	2.000.000.000	41,09	2.000.000.000	41,09	2.150.000.000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				980.000.000		1.400.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.150.000.000		
Meningkatnya Jumlah Layanan Digital yang sesuai dengan Indikator Indeks Keamanan Informasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	1	1	980.000.000	1	1.400.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.150.000.000		
	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	22	34				34				34			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				500.000.000		700.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.250.000.000		
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	1	1	500.000.000	1	700.000.000	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	1	1.250.000.000		
2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				230.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	1	1	230.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				100.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000		
Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	22	34	100.000.000	34	150.000.000	34	200.000.000	34	200.000.000	34	250.000.000		
2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				150.000.000		250.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	-	1	150.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		

**4.3 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas  
Pembangunan Daerah**

Sub kegiatan yang mendukung program prioritas adalah serangkaian aktivitas yang lebih spesifik dan terukur yang dirancang untuk mencapai tujuan utama atau program yang telah ditetapkan. Sub Kegiatan ini saling terkait dan berkontribusi pada pencapaian tujuan program secara keseluruhan. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Diskominfo Kota Balikpapan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 4**  
**Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas**  
**Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Diskominfo**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				
1.	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan komunikasi publik pemerintah daerah	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	
			2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media	
			2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	
			2.16.02.2.01.0018 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
			2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
			2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi	
			2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
			2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	
			2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten	
			2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
2.	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya jumlah layanan digital terintegrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan digital	2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
			2.16.03.2.02 - Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	
			2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
			2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
			2.16.03.2.02.0026 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
			2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
			2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
			2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
			2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	
			2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
			2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
			2.16.03.2.02.0039 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	
3.	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
			2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
			2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
4.	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
			2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	
			2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
			2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

**4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk satu periode kedepan. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan oleh setiap perangkat daerah untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). IKU menjadi acuan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. IKU dirumuskan harus selaras dengan RPJMD dengan mempertimbangkan bidang kewenangan, tugas, dan fungsi perangkat daerah.

Berikut ini disajikan tabel IKU Diskominfo Kota Balikpapan tahun 2025 – 2029 :

**Tabel 4. 5**  
**Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra Diskominfo**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
<b>2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>										
1.	Indeks Literasi Digital	Indeks	-	-	3,6	3,7	3,8	3,9	4	
2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,26	75,18	76,00	77,00	77,50	78,00	78,50	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3.	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	94,64	94,65	94,66	94,68	94,7	94,85	95	
4.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,23	2,23	2,28	2,33	2,38	2,43	2,48	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Digital Pemerintah	Indeks	-	60	62,5	65	70	75	80	

#### 4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, khususnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. IKK mencerminkan prioritas strategis dan hasil yang ingin dicapai, serta berfungsi sebagai alat ukur kinerja instansi pemerintah. IKK menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah, baik secara keseluruhan maupun dalam pelaksanaan program tertentu. IKK membantu pemerintah untuk mengetahui seberapa efektif mereka dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta membantu meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program. Berikut IKK Diskominfo Kota Balikpapan tahun 2025-2029 :

**Tabel 4. 6**  
**Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Diskominfo**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>											
1.	Indeks Literasi Digital	Positif	Indeks	-	-	3,6	3,7	3,8	3,9	4	
2.	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Positif	Nilai	94,64	94,65	94,66	94,68	94,7	94,85	95	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Digital Pemerintah	Positif	Indeks	-	60	62,5	65	70	75	80	
4.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Positif	Nilai	74,26	75,18	76,00	77,00	77,50	78,00	78,50	



NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Positif	%	85	85,5	86	86,5	87	88	89	
6.	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Positif	%	86	86,2	86,5	86,7	86,9	87	87,2	
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Positif	Indeks	87,08	87	87,2	87,5	87,7	87,9	88	
8.	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Positif	%	79,3	80	80,7	81,4	82,1	82,8	83,5	
9.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											
1.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Positif	Poin	2,23	2,23	2,24	2,25	2,26	2,27	2,28	
2.	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Melakukan Publikasi Data Statistik yang Menerapkan Standar Akurasi yang Dimanfaatkan Sebagai Dasar Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Positif	%	17,64	23,52	29,41	35,29	41,17	47,05	52,94	
3.	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Positif	%	37,83	37,83	38,76	40,31	40,31	41,09	41,09	

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Diskominfo Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029 ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029 urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan untuk tercapainya Visi, Misi serta Sasaran Pembangunan Daerah Kota Balikpapan.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Diskominfo Kota Balikpapan ini akan menjadi acuan dalam Evaluasi dan Penilaian Kinerja Diskominfo Kota Balikpapan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Kota Balikpapan dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Diskominfo Kota Balikpapan dalam 5 (Lima) tahun ke depan yakni tahun 2025 – 2029 dan diharapkan upaya Diskominfo Kota Balikpapan dapat lebih terarah dan terukur.

Penetapan Renstra Diskominfo Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun. Dengan tersusunnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Kota Balikpapan ini, diharapkan agar seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik serta membawa kemajuan signifikan bagi pencapaian Tujuan dan Sasaran Diskominfo Kota Balikpapan dan Visi Misi Pemerintah Kota Balikpapan. Implementasi dari Renstra ini tentu sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan agar bersama wujudkan visi-misi Pemerintah Kota Balikpapan demi kesejahteraan masyarakat.

## O. DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Perindustrian (DKUMKMP) Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 memiliki dasar hukum yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272–273, setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Ketentuan tersebut diperjelas oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 29 yang mendefinisikan Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahun.

Renstra DKUMKMP Kota Balikpapan merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025–2029. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mengarahkan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan DKUMKMP agar selaras dengan visi, misi, serta program Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dengan demikian, Renstra ini menjadi landasan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja DKUMKMP selama lima tahun ke depan.

Sebagai dokumen penting, Renstra DKUMKMP menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama periode lima tahun. Renstra juga berperan sebagai acuan dalam pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan yang dilakukan oleh DKUMKMP. Dengan adanya Renstra ini, pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara terarah, terukur, dan berkesinambungan sesuai dengan prioritas pembangunan Kota Balikpapan, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah untuk mendukung pengembangan koperasi, UMKM, dan sektor perindustrian.

#### 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah;
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perkoperasian;
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Industri Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Industri;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 6 E);
25. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Renstra ini menjadi acuan resmi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun, sekaligus menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, hingga program pembangunan sesuai tugas dan fungsi DKUMKMP. Selain itu, Renstra ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi organisasi serta arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan, memudahkan jajaran aparatur dalam menyusun program secara terpadu, terarah, terukur, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi.

Tujuan penyusunan Renstra DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 adalah menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Renstra ini memberikan arahan yang jelas mengenai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan selama lima tahun ke depan, serta menyediakan tolok ukur kinerja yang dapat digunakan sebagai dasar pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Dengan adanya Renstra ini, seluruh aparatur DKUMKMP memperoleh pedoman yang terarah dalam penyusunan Renja tahunan, sehingga tercapai sinergi dan konsistensi dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (DKUMKMP) Kota Balikpapan adalah, sebagai berikut :

### Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
  - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah;
  - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
  - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - 2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah
  - 2.2.2 Isu Strategis

### Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029;
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029;
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029;
- 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029

### Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
- 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

### BAB V PENUTUP.







## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

## **2.1 GAMBARAN PELAYANAN DKUMKMP Kota Balikpapan**

### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian**

Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian (DKUMKMP) Kota Balikpapan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Balikpapan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Energi sesuai Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, UMKM, perindustrian, energi dan sumber daya mineral;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan koperasi, UMKM, perindustrian, energi dan sumber daya mineral;
- c. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan koperasi, UMKM, perindustrian, energi dan sumber daya mineral;
- d. Pengaturan, perencanaan, dan penyelenggaraan teknis di bidang koperasi, UMKM, perindustrian, energi dan sumber daya mineral;
- e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi penyelenggaraan urusan koperasi, UMKM, perindustrian, energi dan sumber daya mineral;
- f. Pengoordinasian pemberdayaan bidang koperasi, UMKM, perindustrian, energi dan sumber daya mineral;
- g. Pengelolaan UPTD;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala DKUMKMP Kota Balikpapan**

Kepala DKUMKMP Kota Balikpapan sesuai Lampiran XIX Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.



Kepala DKUMKMP melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan bidang perindustrian;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bidang koperasi, UMKM dan bidang perindustrian serta bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan koperasi, UMKM, perindustrian, energi dan sumber daya mineral;
- d. pengaturan, perencanaan, dan penyelenggaraan teknis di bidang koperasi, UMKM, perindustrian, energi dan sumber daya mineral;
- e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi penyelenggaraan urusan koperasi, UMKM, perindustrian, energi dan sumber daya mineral;
- f. pengoordinasian pemberdayaan bidang koperasi dan UMKM;
- g. pembinaan dan pengelolaan UPTD;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DKUMKMP Kota Balikpapan**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian:

- a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
- b. Administrasi keuangan;
- c. Administrasi barang milik daerah pada dinas;
- d. Administrasi kepegawaian;
- e. Administrasi umum;
- f. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
- g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
- h. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
- i. Layanan informasi dan pengaduan; dan
- j. Pembinaan pelayanan publik

Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah;
- c. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;

- d. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. Pengoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- g. Penyelenggaraan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- h. Pembinaan dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik;
- i. Pengelolaan survei kepuasan masyarakat;
- j. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- k. Pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksana;
- l. Pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
- m. Pengoordinasian pengelolaan anggaran dan penerimaan retribusi;
- n. Pengoordinasian administrasi keuangan;
- o. Pengelolaan dan penata usahaan barang milik daerah di lingkungan perangkat daerah;
- p. Pengoordinasian bidang dan uptd;
- q. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban tugas dan fungsi; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat terdiri atas: Subbagian Umum, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- g. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik daerah;
- i. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;

- j. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- k. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- n. Memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
- o. Memfasilitasi pembinaan tatakelola pelayanan publik;
- p. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
  - 1) Rencana strategis;
  - 2) Rencana kerja;
  - 3) Rencana kinerja tahunan;
  - 4) Penetapan kinerja; dan
  - 5) Laporan kinerja;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. Melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. Mengumpulkan dan menganalisis data hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan pemeliharaan aplikasi dengan bidang;
- h. Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas bidang;
- i. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- j. Mengoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- k. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- l. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
- m. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- n. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
- o. Menyusun laporan keuangan dinas;
- p. Mengelola informasi dan dokumentasi serta pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;
- q. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- r. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya

### **3. BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH**

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah;
- c. Perumusan dan pelaksanaan pola kemitraan koperasi;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan sosialisasi pembentukan koperasi;
- e. Pengoordinasian dan verifikasi dokumen izin usaha perkoperasian;
- f. Pelaksanaan pembinaan perkoperasian;
- g. Pengkoordinasian dan verifikasi bahan kebijakan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi;
- h. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan koperasi;
- i. Pelaksanaan bimbingan dan fasilitasi kemitraan koperasi;
- j. Pelaksanaan pelatihan koperasi bagi pelaku dan/atau pengurus koperasi;
- k. Pelaksanaan promosi kegiatan usaha koperasi;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengelompokan substansi Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah menyelenggarakan uraian tugas yang terdiri atas:

1. Substansi Bina Kelembagaan Koperasi, mempunyai tugas:
  - a. Menyusun program dan kegiatan Substansi Bina Kelembagaan Koperasi;
  - b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis kegiatan pengendalian mutu koperasi;
  - c. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu koperasi;
  - d. Menyusun dan menyajikan data informasi mengenai koperasi;
  - e. Melaksanakan penilaian kesehatan koperasi;
  - f. Melaksanakan fasilitasi pemberian penghargaan kesehatan koperasi atau unit koperasi;
  - g. Melaksanakan pembinaan koperasi berprestasi;
  - h. Memberikan bimbingan dan fasilitasi kemitraan antara koperasi dengan badan usaha milik negara dan swasta;
  - i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Substansi Bina Usaha Mikro, Kecil, Menengah, mempunyai tugas:
  - a. Menyusun program dan kegiatan Substansi Bina Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
  - b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang bina usaha koperasi;
  - c. Melaksanakan sosialisasi tata cara pembentukan koperasi;
  - d. Melaksanakan administrasi pengesahan badan hukum koperasi;
  - e. Melaksanakan kebijakan pemberdayaan koperasi simpan pinjam dan koperasi serba usaha;
  - f. Melaksanakan pembinaan teknis perkoperasian;
  - g. Menyiapkan bahan kebijakan operasional perkoperasian;
  - h. Menyusun bahan pembinaan koperasi simpan pinjam dan koperasi serba usaha;
  - i. Memfasilitasi dan menganalisa dokumen pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi;

- j. Menganalisa dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
  - k. Mengoreksi berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
  - l. Melaksanakan survei dan pemantauan pendirian koperasi dan penilaian koperasi;
  - m. Mengelola dan menganalisa online data sistem koperasi;
  - n. Melaksanakan diklat perkoperasian;
  - o. Melaksanakan promosi perkoperasian;
  - p. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Substansi Pengawasan dan Pengendalian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, mempunyai tugas:
- a. Menyusun program dan kegiatan Substansi Pengawasan dan Pengendalian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
  - b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis kegiatan pengendalian dan pengawasan koperasi;
  - c. Merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan koperasi;
  - d. Melaksanakan fasilitasi pengawasan bantuan alat dan/atau permodalan bagi koperasi;
  - e. Menyusun dan menyajikan data informasi koperasi yang tidak aktif dan koperasi yang habis masa berlaku badan hukum koperasi;
  - f. Melakukan pengendalian dan pengembangan koperasi aktif;
  - g. Melaksanakan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi;
  - h. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pembinaan koperasi;
  - i. Mengoreksi berkas permohonan pembubaran koperasi;
  - j. Mengoreksi perubahan anggaran dasar koperasi;
  - k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4. BIDANG INDUSTRI KECIL MENENGAH**

Bidang Industri Kecil Menengah mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Industri Kecil Menengah.

Bidang Industri Kecil Menengah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Industri Kecil Menengah;
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan program kerja bidang UMKM;
- c. Perumusan kebijakan teknis pada kegiatan usaha mikro dan kecil;
- d. Perumusan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil;
- e. Pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil;
- f. Penyiapan dan pengembangan sistem produksi usaha mikro dan kecil;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi usaha mikro dan kecil;
- h. Pengendalian pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk usaha mikro dan kecil;
- i. Pelaksanaan pembinaan sarana usaha produksi dan pengendalian mutu usaha mikro dan kecil;
- j. Pelaksanaan fasilitasi pemasaran dan promosi hasil produksi usaha mikro dan kecil;
- k. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha mikro dan kecil dengan pelaku usaha lainnya;
- l. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengelompokan substansi Bidang Industri Kecil Menengah menyelenggarakan uraian tugas yang terdiri atas:

1. Substansi Pengendalian Mutu Industri, mempunyai tugas:
  - a. Menyusun program dan kegiatan Substansi Pengendalian Mutu Industri;
  - b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian mutu UMKM;

- c. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian mutu UMKM;
  - d. Melaksanakan pembinaan teknis peningkatan pengendalian mutu hasil produksi usaha mikro dan kecil;
  - e. Melaksanakan penyusunan dan pembinaan produk unggulan dan produk andalan potensial usaha mikro dan kecil;
  - f. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pengembangan standar pengawasan mutu dan sertifikasi produk di bidang usaha mikro dan kecil;
  - g. Memfasilitasi konsultasi, bimbingan dan fasilitasi perlindungan hak atas kekayaan intelektual produk usaha mikro dan kecil;
  - h. Melakukan fasilitasi pengujian standar mutu dan standar proses produksi usaha mikro dan kecil;
  - i. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan standar mutu produk usaha mikro dan kecil;
  - j. Menyusun dan menyajikan data dan informasi mutu usaha mikro dan kecil;
  - k. Melaksanakan pemberdayaan, perlindungan dan pengembangan usaha mikro dan kecil;
  - l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Substansi bina usaha industri, mempunyai tugas:
- a. Menyusun program dan kegiatan substansi bina usaha industri;
  - b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang bina umkm;
  - c. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan bina umkm;
  - d. Melaksanakan kebijakan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana promosi usaha mikro dan kecil;
  - e. Memfasilitasi promosi dan pemasaran produk usaha mikro dan kecil;
  - f. Menyiapkan bahan kerja sama lintas program dan lintas sektor untuk pengembangan usaha mikro dan kecil;
  - g. Melaksanakan penyiapan pengembangan pembinaan pemantauan evaluasi sarana dan prasarana promosi dan pelatihan;



- h. Melaksanakan pemantauan dan fasilitasi kepastian berusaha terhadap usaha mikro dan kecil;
  - i. Menyusun dan menyajikan data dan informasi usaha mikro dan kecil;
  - j. Melaksanakan fasilitasi pengembangan wawasan serta kemampuan pemasaran hasil usaha mikro dan kecil;
  - k. Melaksanakan fasilitasi kegiatan dewan kerajinan nasional daerah;
  - l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Substansi bina produksi industri, mempunyai tugas:
- a. Menyusun program dan kegiatan substansi bina produksi industri;
  - b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang kewirausahaan umkm;
  - c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan umkm;
  - d. Menyusun rencana pendidikan, keterampilan dan pelatihan serta bimbingan teknis usaha mikro dan kecil;
  - e. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan teknis peningkatan produksi dan diversifikasi produksi usaha mikro dan kecil;
  - f. Melaksanakan sosialisasi hasil penelitian usaha mikro dan kecil;
  - g. Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap proses produksi usaha mikro dan kecil;
  - h. Menyusun dan menyajikan data dan informasi produksi usaha mikro dan kecil;
  - i. Melaksanakan fasilitasi pembentukan jejaring pelaku usaha bagi pertumbuhan dan pengembangan usaha mikro dan kecil;
  - j. Melaksanakan fasilitasi perizinan usaha mikro dan kecil;
  - k. Mengoiah dan menganalisa data izin usaha mikro dan kecil;
  - l. Melakukan pemantauan dan pendataan potensi usaha mikro dan kecil dan/atau wirausaha baru;
  - m. Melaksanakan fasilitasi sosialisasi perizinan usaha mikro;

- n. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro;
- o. Melaksanakan kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia serta desain usaha mikro;
- p. Melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha mikro dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, toko swalayan dan pusat perbelanjaan;
- q. Melaksanakan fasilitasi bantuan alat dan/atau permodalan usaha mikro;
- r. Menyelenggarakan fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda;
- s. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya

#### **4. BIDANG TEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA INDUSTRI**

Bidang Teknologi dan Sumber Daya Industri mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Teknologi dan Sumber Daya Industri.

1. Bidang Teknologi dan Sumber Daya Industri mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Teknologi dan Sumber Daya Industri;
  - b. Penyusunan kebijakan teknis di bidang industri dan energi; lembaga lainnya dalam program alih teknologi industri sarana prasarana industri kecil dan menengah;
  - c. Melaksanakan penyusunan penataan industri untuk pengembangan pusat-pusat industri kecil dan menengah; melaksanakan penyiapan penyediaan dan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana industri di dalam kawasan sentra dan di luar kawasan sentra industri;
  - d. Memfasilitasi kebijakan dan regulasi di bidang industri kecil dan menengah;
  - e. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri kecil dan menengah;

- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Substansi Bina Teknologi dan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, mempunyai tugas:
- a. Menyusun program dan kegiatan Substansi Bina Teknologi dan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian industri dan sumber daya energi;
  - c. Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan pengembangan sarana, usaha dan produksi di bidang industri kecil dan menengah;
  - d. Menyiapkan bahan pembinaan pengembangan teknologi dan penguatan kapasitas sumber daya pelaku usaha industri kecil dan menengah;
  - e. Menyiapkan bahan bimbingan teknis, penerapan dan diversifikasi teknologi tepat guna bagi peningkatan produksi industri kecil dan menengah;
  - f. Melaksanakan pembinaan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
  - g. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengamanan dan penyelamatan industri kecil dan menengah;
  - h. Melaksanakan penyusunan program kegiatan pengendalian dan pengawasan izin usaha industri kecil dan menengah;
  - i. Melaksanakan pemantauan dalam rangka pengendalian dan pengawasan izin usaha industri kecil dan menengah;
  - j. Melaksanakan kajian energi terbarukan dan alternatif energi;
  - k. Menyusun bahan analisa ketersediaan dan penyaluran energi serta sumber daya industri kecil dan menengah untuk industri yang ramah lingkungan;
  - l. Melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan daerah terhadap penggunaan energi dan sumber daya alam kepada pelaku usaha;
  - m. Melaksanakan kaji terap pengelolaan dan pengendalian limbah industri kecil dan menengah;

- n. Melaksanakan pemantauan pengendalian limbah industri kecil dan menengah;
  - o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - p. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai bidang tugasnya.
3. Substansi Bina Energi dan Sumber Daya Industri, mempunyai tugas:
- a. Menyusun program dan kegiatan Substansi Bina Energi dan Sumber Daya Industri;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi industri;
  - c. Menyusun informasi potensi energi dan sumber daya industri Daerah;
  - d. Melakukan analisis data industri kecil dan menengah;
  - e. Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi teknologi di bidang industri kecil dan menengah;
  - f. Menyiapkan informasi dan menyajikan data usaha di bidang industri kecil dan menengah;
  - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi sistem informasi industri;
  - h. Melakukan kajian pengembangan sistem informasi industri;
  - i. Melakukan promosi dan publikasi produk industri kecil dan menengah;
  - j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai bidang tugasnya.

##### **5. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala UPTD Sentra Industri Kecil**

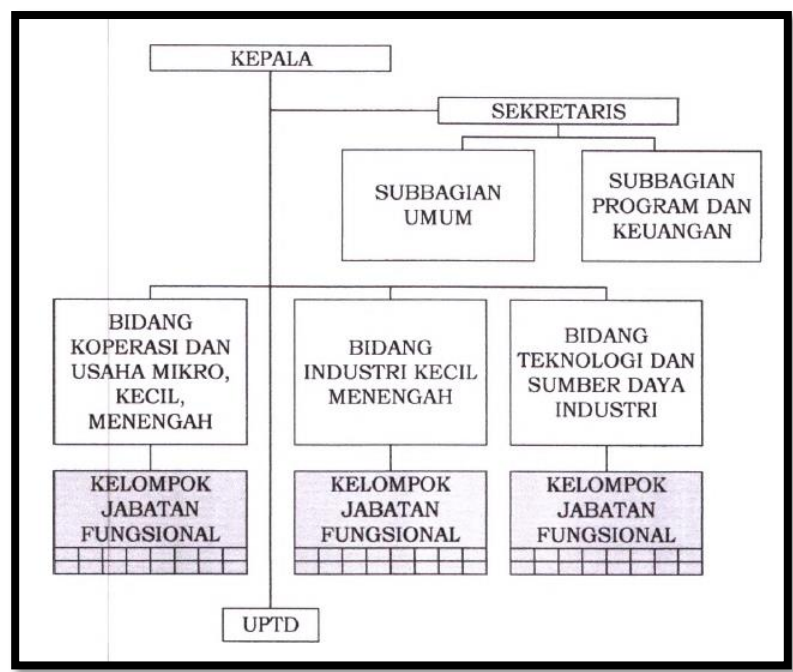
UPTD merupakan UPTD operasional Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang diatur berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2018. Untuk menunjang operasional UPTD SIK dibentuk sub unit yang terdiri atas:

- a. Sub Unit Produksi Wilayah Sember
- b. Sub Unit Instalasi Pengelolaan Air Bersih dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Wilayah Sember
- c. Sub Unit Produksi Wilayah Teritip
- d. Sub Unit Instalasi Pengelolaan Limbah Cair dan Limbah Padat Wilayah Teritip

6. Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

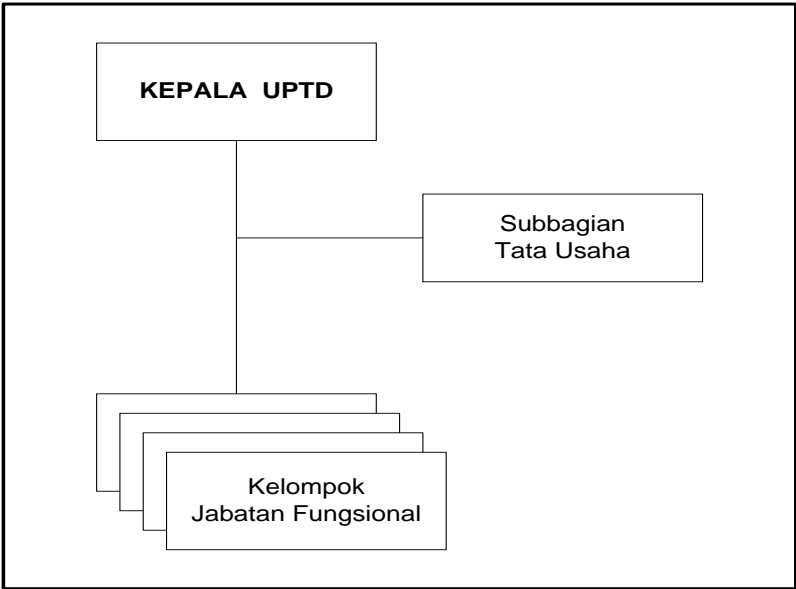
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri

Adapun Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan Kota Balikpapan dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



Gambar 2.1  
Struktur Organisasi DKUMKMP Kota Balikpapan

Adapun struktur Unit Pelaksana Teknis Daerah Sentra Industri Kecil sebagai berikut:



Gambar 2.2  
Struktur Organisasi UPTD SIK  
(Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2018)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar

Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

2.1.2 Sumber Daya DKUMKMP Kota Balikpapan

Fungsi DKUMKMP Kota Balikpapan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana.

Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkan berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada DKUMKMP Kota Balikpapan.

1. Kondisi Kepegawaian DKUMKMP Kota Balikpapan

Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh DKUMKMP Kota Balikpapan dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sesuai struktur organisasi terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) orang, yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) orang ASN dan 9 (sembilan) orang Non PNS.

Tabel 2.1  
SDM DKUMKMP Kota Balikpapan Per Agustus 2025

Jabatan	Golongan				Sub Total	Pendidikan								Sub Total	Jenis Kelamin	
	IV	III	II	I		S-3	S-2	S-1	D3/ D4	SLTA	SLTP	SD	L		P	
Kepala Dinas	1				1		1						1	1		
Sekretaris Dinas	1				1		1						1	1		
Kepala Bidang	3				3		2	1					3	1	2	
Kepala UPTD		1			1			1					1		1	
Kepala Sub Bagian / TU		3			3		1	2					3	1	2	
Fungsional		4			4		1	2		1			4	1	3	
Pelaksana	1	7	3		11	1		4		6			11	5	6	
Jumlah PNS/CPNS/PPPK	6	15	3	-	24	1	6	10	-	7	-	-	24	10	14	
NON ASN					-			5		3	1		9	2	7	
Jumlah Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	5	-	3	1	-	9	2	7	
TOTAL SDM (PNS/CPNS + Non PNS)	33															

Data

Sub Bagian Umum, DKUMKMP, 2025

2. Kondisi Sarana Prasarana DKUMKMP Kota Balikpapan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DKUMKMP dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan, perlengkapan, peralatan dan asset lainnya.

Berikut adalah daftar asset yang dimiliki oleh DKUMKMP.

Tabel 2.2  
Jumlah Asset / modal dan unit usaha yang masih beroperasi

No	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (Rp)		Jumlah aset yang tidak dipakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp	Unit	Rp	
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	449,552,000.00			Pembayaran 100% pekerjaan pembangunan Kantor UPT SIKS
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	773,756,000.00			Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Pengelola UPT SIKHPK (30%+Termin 4+100%)
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	113,313,598.00			Kanopi Gedung Kantor UPT SIKS (Fisik)
4	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	205,159,355.00			Fisik Rehab Bangunan Kantor PRIMKOPTI Tahun 2023 (Reklas dari Anggaran Pemeliharaan)
5	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	7,120,522,906.33			Belanja Modal Pembangunan Gudang Bahan Baku SIKT
6	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)+D502:D529	1	159,139,000.00			Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang (Renovasi Gudang Kedelai)
7	Bangunan Gudang Untuk Bengkel Lain-lain	1	226,753,903.00			Belanja Rehab Bangunan Inkubator Mainan Anak di SIKS Tahun 2023
8	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1	50,374,215.36			Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Lapangan Beton) UPT SIKS
9	Gedung Pos Jaga Permanen	1	206,516,000.00			Pembayaran 100% selesai atas Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga SIKHPK
10	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	40,766,409.00			Tempat Parkir/Garasi Gedung Kantor UPT SIKS (Fisik)
11	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	1	35,963,000.00			
12	Bangunan Pabrik Es	1	115,640,000.00			Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pembangunan Rumah Genset pada Cold Storage di SIKT)
13	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	1,503,390,908.00			Berdasarkan Penilaian KJPP Tahun 2012,
14	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	1,566,292,923.00			Belanja Modal Pengadaan/Pembelian Bangunan Rumah Produksi/Industri (Pembangunan Fisik Rumah Produksi Tahu Tempe) 30%
15	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	379,582,000.00			Belanja Rumah Contoh (100%)
16	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	7,180,721,700.00			Pembangunan Rumah Produksi SIKHPK (Paket 1+Paket2+Paket3+Paket4+Paket5 +DED+Supervisi)
17	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	1,653,002,933.00			Pembangunan Rumah Produksi SIKT Tahap II
18	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	2,579,285,847.09			Belanja Modal Pembangunan Rumah Produksi SIKS (6 unit)
19	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	182,530,000.00			* Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Industri
20	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	218,930,000.00			Belanja Modal Perlengkapan Gedung Kantor (Partisi Ruang Laktasi)

No	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (Rp)		Jumlah aset yang tidak dipakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp	Unit	Rp	
21	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	1	11,550,000.00			Gazebo Taman UPT SIK
22	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	1	222,041,000.00			Belanja Pembangunan Pendopo/Gazebo SIKS Tahun 2023
23	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	1	3,361,021,900.00			Pembangunan Rumah Produksi Tahu Tempe
24	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	1	4,583,784,012.00			Pembangunan 14 Unit Rumah Produksi Tahu Tempe di SIKS
25	Taman Permanen	1	32,868,596.00			Taman Samping Papa Nama SIKS
26	Taman Permanen	1	106,651,050.00			Taman di Area Pintu Masuk SIKT
27	Taman lainnya	1	69,040,000.00			Belanja Modal Pengadaan Taman Kantor (Pembuatan Taman dan Pemasangan Papan Nama UPT SIKS)
28	Taman lainnya	1	171,666,000.00			Pengadaan Taman Kantor dan IPAL SIKS
29	Taman lainnya	1	119,617,688.00			Belanja Modal Pembuatan Taman Pinggir Pagar UPT SIKT
30	Pagar Permanen	1	1,331,853,190.00			Pembangunan Pagar dan Gerbang SIKHPK (Paket1+Paket2+DED+Supervisi)
31	Pagar Permanen	1	2,011,310,667.74			Pengadaan Bangunan Pembatas/Pagar SIKS (holow depan 230m dan precast samping 374m)
32	Pagar Lain-lain (dst)	1	201,525,013.00			Pembuatan Pagar Siring Gedung UPT SIKS
34	Tugu/tanda batas lainnya	1	206,033,500.00			Pembangunan Pintu Gerbang SIKT
KIB D (Jaringan jalan dan irigasi)			27,632,440,647.08			
1	Jalan Khusus Kompleks	1	11,441,945,411.73			Pembangunan Jalan SIKHPK (Paket1+Paket2+DED+Supervisi)
2	Jalan Khusus Kompleks	1	2,713,191,067.66			Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase SIK Somber (Jalan 551,7 M, Drainase 781,5M)
3	Jalan Khusus Proyek	1	294,474,000.00			* Pengadaan Konstruksi Jalan ( KIKS Tahap II )
4	Jalan Khusus Perorangan	1	147,350,500.00			Belanja Modal Pengadaan Jalur Pejalan Kaki ( Pembuatan Trotoar 400 M )
5	Saluran Drainage	1	1,805,509,755.00			Pembangunan Drainase/Saluran Air SIKHPK (Paket1+Paket2+DED+Supervisi)
6	Saluran Drainage	1	201,028,812.00			Belanja Pembangunan / Peningkatan Drainase UPT SIKS
7	Sumur Artetis	1	538,728,000.00			Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air (Pembangunan Fisik Sumur Dalam)
8	Bangunan Pengambilan Dari Sumur Artetis	1	270,276,000.00			Pembayaran Pekerjaan Pembuatan Sumur Dalam SIKHPK
9	Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	1	1,070,808,000.00			Pembayaran pekerjaan Pembangunan Instalasi Air Bersih dan Jaringan SIKHPK (30% dan 100%)



No	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (Rp)		Jumlah aset yang tidak dipakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp	Unit	Rp	
10	Bangunan Penampung Air Baku	1	342,405,000.00			Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku (Pembangunan Tandon 200 M3)
11	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1	211,173,133.00			Belanja Pembuatan Dudukan Tandon beserta Tandon di Rumah Produksi SIKT Tahun 2023 (9 Unit)
12	Saluran Pengumpul Air Buangan Pertanian	1	934,750,490.00			Pembayaran 100% selesai atas pekerjaan pembangunan fisik jaringan air limbah
13	Saluran Pembuang Air Buangan Air Pertanian	1	3,993,361,893.69			Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) SIKS
14	Saluran Pembuang Air Buangan Air Pertanian	1	2,743,179,000.00			Pengadaan Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) SIKT
15	Sumur Resapan	1	378,612,744.00			
16	Sumur Resapan	1	7,429,800.00			
17	Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	147,010,000.00			Penyambungan Pasang Baru PLN di SIKT (Rumah Produksi, Kantor Pengelola, Pos Jaga dan Rumah Pompa IPAB)
18	Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	152,474,000.00			Penyambungan Pasang Baru PLN di SIKS (14 Rumah Produksi tahun 2018 dan Rumah Contoh)
19	Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	11,286,000.00			Pemasangan Instalasi Listrik Kantor UPT SIKS
20	Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	69,323,940.00			Belanja Penambahan Daya Listrik dan Instalasi Gedung Kantor
21	Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	26,943,100.00			Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik (Tambah Daya dan Pasang Baru) UPT SIK
22	Instalasi Benteng	1	10,450,000.00			Pasang Baru Listrik di Rumah Batik Dekranasda daya 5.500 VA + SLO
23	Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain	1	120,730,000.00			Swakelola Pemasangan Sambungan Baru Air PDAM + Biaya Materai di SIKT
KIB E (Aset Tetap Lainnya)			44,917,000.00		-	
1	Buku Umum Lain-lain	1	44,917,000.00			Pengadaan Dokumen Perencanaan Kajian Pemanfaatan Tahu Tempe Menjadi Energi
KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan)			137,760,600.00		-	
1	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	14,487,000.00			DED Rumah Kemasan SIKT
2	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	24,150,500.00			Review DED Rumah Produksi SIKT
3	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	19,080,600.00			Review DED Pembangunan Rumah Produksi SIKS
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	1	37,170,000.00			DED Kolam Retensi SIKT
5	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	1	42,872,500.00			DED Pembangunan Instalasi dan jaringan Distribusi Air Baku SIKT
TOTAL ASET GABUNGAN			73,558,850,151.60			

Data Sub Bagian Umum, DKUMKMP, 2025

Sarana dan Prasarana DKUMKMP terdiri dari aset tetap (*fixed asset*) baik aset berwujud (*tangible*) dan aset tidak berwujud (*intangible*) yang dirincikan sebagai berikut :

## **A. ASET BERWUJUD**

### **1. Tanah dan Bangunan**

Bangunan Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian merupakan aset yang tercatat sebagai aset tetap. Selain bangunan kantor terdapat pula UPTD yang merupakan bagian bangunan kantor OPD yang beroperasi untuk pelayanan dari Sentra Industri Kecil. Jumlah kantor pelayanan UPTD yang dimiliki sejumlah 2 unit yaitu Sentra Industri Kecil Sumber dan Sentra Industri Kecil Teritip. Berdasarkan pencatatan aset bangunan akhir tahun pelaksanaan Renstra 2016-2021 terdeskripsi sebagai berikut:

- a) Bangunan Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan yang terletak di Jalan Ruhui Rahayu 1 No.07 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan dibangun dan mulai beroperasi sejak tahun 2006 dengan sumber dana pembangunan APBD Kota Balikpapan dengan luas bangunan  $\pm 1.200\text{m}^2$  di atas luasan lahan  $3.067\text{ m}^2$ . Kondisi bangunan saat ini dalam kondisi 85% baik.
- b) Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya pada Sentra Industri Kecil Sumber terletak di Jalan A.W Syahrani RT.85 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara merupakan Sentra Industri Tahu tempe yang mulai direlokasi sejak tahun 1996 dengan luasan lahan  $90.000\text{m}^2$ . Bangunan-bangunan yang berada dilokasi di antaranya Kantor, Gudang, Rumah Produksi, Pos Jaga, IPAL, IPAB, Masjid, Rumah Susun, Inkubator Industri dan Bisnis serta Bangunan Pendukung Lainnya. Kondisi bangunan sebagian besar dalam keadaan 85% baik.
- c) Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya pada Sentra Industri Kecil Teritip terletak di Jalan Teritip Laut RT.08 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur merupakan Sentra Industri Kecil Hasil Kelautan dan Pertanian yang mulai didirikan sejak tahun 2016 dengan luasan lahan  $62.983\text{m}^2$ . Bangunan-bangunan yang berada dilokasi di antaranya Kantor, Gudang Bahan Baku, Rumah Produksi, Pos Jaga, IPAL, IPAB, dan Bangunan Pendukung Lainnya. Kondisi bangunan sebagian besar dalam keadaan 85% baik.

## **2. Peralatan dan Mesin**

Dalam operasionalnya, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan didukung dan dilengkapi dengan sejumlah peralatan dan perlengkapan di antaranya:

- a) Kendaraan Roda 4 sebanyak 10 Unit yang digunakan sebagai kendaraan dinas dan operasional kantor dengan penempatan 8 unit pada kantor induk dan 2 unit pada Sentra Industri Kecil.
- b) Kendaraan Roda 2 sebanyak 11 Unit yang digunakan sebagai kendaraan dinas dan operasional kantor dengan penempatan 9 unit pada kantor induk dan 2 unit pada Sentra Industri Kecil.
- c) Elektrik Generating Set sebanyak 1 unit sebagai sumber listrik cadangan yang ditempatkan di kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan.
- d) Peralatan Komputer yang digunakan terdiri dari 39 Unit Personal Komputer, 34 Unit Printer dan 9 Unit Scanner dengan kondisi 95% baik.
- e) Peralatan dan mesin lainnya yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin dapat dikategorikan sebagai sarana pendukung operasional kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan.

## **3. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Berdasarkan inventarisasi yang tercatat oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian, prasarana yang merupakan aset tetap sebagai berikut:

- a. Prasarana Bangunan Kantor OPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
  1. Akses jalan Kantor OPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian berada pada poros jalan Ruhui Rahayu 1 Kelurahan Sepinggan Baru.
  2. Pagar bangunan Kantor OPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian memiliki pagar kantor dengan panjang keliling  $\pm 250$  m.
  3. Halaman Kantor OPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian memiliki halaman kantor dengan luas  $\pm 900$  m<sup>2</sup>.
  4. Parkiran Kantor OPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian memiliki area parkir kendaraan:

- a) Roda 4 yang berada di halaman dengan dengan luas  $\pm 400 \text{ m}^2$ .
    - b) Roda 2 yang berada di halaman belakang dengan luas  $\pm 100 \text{ m}^2$ .
  - 5. Lapangan olahraga Kantor OPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian masih menggunakan Halaman Kantor, belum memiliki lapangan olahraga khusus.
  - 6. Taman Kantor OPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian berada di sekeliling gedung kantor utama dan di pinggiran pagar depan dan belakang.
  - 7. Lampu penerangan jalan dan kantor. Disekitar Kantor OPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian terdapat penerangan jalan dan kantor sejumlah 16 titik.
  - 8. Bangunan Dapur. Kantor OPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian memiliki Bangunan Dapur dengan luas  $\pm 16 \text{ m}^2$ .
  - 9. Ruang Genset. Kantor OPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian belum memiliki bangunan Ruang Genset dengan luas  $\pm 10 \text{ m}^2$ .
  - 10. Jaringan telekomunikasi. Kantor OPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian memiliki jaringan telekomunikasi berupa telepon kantor dan internet.
  - 11. Jaringan air bersih. Kantor OPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian memiliki jaringan air bersih yang terpasang pada bangunan.
  - 12. Jaringan listrik. Kantor OPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian memiliki jaringan instalasi listrik yang terpasang pada bangunan.
- b. Prasarana Bangunan Kantor UPT Sentra Industri Kecil Sumber Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian:
- 1. Prasarana Bangunan Kantor UPT Sentra Industri Kecil Sumber
    - a) Akses jalan Kantor UPT Sentra Industri Kecil Sumber berada pada poros jalan A. Wahab Syahrani Kelurahan Muara Rapak.
    - b) Pagar bangunan. Kantor UPT Sentra Industri Kecil Sumber memiliki keliling lahan sepanjang  $\pm 1.160 \text{ m}$  dan sebagian sudah dilakukan pemasangan pagar kantor dengan panjang keliling  $\pm 720 \text{ m}$
    - c) Jaringan Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPAB). UPT Sentra Industri Kecil Sumber memiliki Sistem Jaringan Instalasi Pengolahan Air Bersih yang digunakan sebagai distribusi air bersih kemasing-masing rumah produksi.
    - d) Jaringan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). UPT Sentra Industri Kecil Sumber memiliki Sistem Jaringan Instalasi Pengolahan Air Limbah yang digunakan sebagai jalur distribusi limbah dari masing-masing rumah produksi ke Unit Pengolahan Limbah.
    - e) Taman/Area Terbuka UPT Sentra Industri Kecil Sumber memiliki area taman/area terbuka yang terbagi di beberapa titik.

- f) Lampu penerangan jalan dan kantor UPT Sentra Industri Kecil Sumber disekitar Kantor terdapat penerangan jalan dan kantor sejumlah 16 titik.
  - g) Bangunan Masjid. UPT Sentra Industri Kecil Sumber memiliki bangunan Masjid yang berada bagian tengah Sentra Industri.
  - h) Bangunan Rumah Susun. UPT Sentra Industri Kecil Sumber memiliki bangunan Rumah Susun Masjid yang berada di sudut selatan Sentra Industri dan dibawah pengelolaan Dinas Perumahan dan Permukiman.
  - i) Gudang Kedelai. UPT Sentra Industri Kecil Sumber belum memiliki bangunan Gudang yang digunakan sebagai penyimpanan bahan baku kedelai.
  - j) Jaringan telekomunikasi. UPT Sentra Industri Kecil Sumber memiliki jaringan telekomunikasi berupa telepon kantor dan internet.
  - k) Jaringan air bersih. UPT Sentra Industri Kecil Sumber memiliki jaringan air bersih yang terpasang pada bangunan.
  - l) Jaringan listrik. UPT Sentra Industri Kecil Sumber memiliki jaringan instalasi listrik yang terpasang pada bangunan.
2. Prasarana Bangunan Kantor UPT Sentra Industri Kecil Teritip
- a) Akses jalan Kantor UPT Sentra Industri Kecil Teritip berada pada poros Jalan Teritip Laut RT.08 Kelurahan Teritip.
  - b) Pagar bangunan. Kantor UPT Sentra Industri Kecil Teritip memiliki keliling lahan sepanjang  $\pm 1.068$  m dan sebagian sudah dilakukan pemasangan pagar kantor dengan panjang keliling  $\pm 1.068$  m.
  - c) Jaringan Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPAB). UPT Sentra Industri Kecil Teritip memiliki Sistem Jaringan Instalasi Pengolahan Air Bersih yang digunakan sebagai distribusi air bersih kemasing-masing rumah produksi.
  - d) Jaringan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). UPT Sentra Industri Kecil Teritip memiliki Sistem Jaringan Instalasi Pengolahan Air Limbah yang digunakan sebagai jalur distribusi limbah dari masing-masing rumah produksi ke Unit Pengolahan Limbah.
  - e) Taman/Area Terbuka UPT Sentra Industri Kecil Teritip memiliki area taman/area terbuka yang terbagi di beberapa titik.
  - f) Lampu penerangan jalan dan kantor UPT Sentra Industri Kecil Teritip disekitar Kantor terdapat penerangan jalan dan kantor sejumlah 20 titik
  - g) Gudang Bahan Baku. UPT Sentra Industri Kecil Teritip belum memiliki bangunan Gudang yang digunakan sebagai penyimpanan bahan baku produksi.
  - h) Jaringan telekomunikasi. UPT Sentra Industri Kecil Teritip memiliki jaringan telekomunikasi berupa telepon kantor dan internet.
  - i) Jaringan air bersih. UPT Sentra Industri Kecil Teritip memiliki jaringan air bersih yang terpasang pada bangunan.

- j) Jaringan listrik. UPT Sentra Industri Kecil Teritip memiliki jaringan instalasi listrik yang terpasang pada bangunan.

**2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan DKUMKMP Kota Balikpapan**

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian (DKUMKMP) Kota Balikpapan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Balikpapan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Capaian kinerja DKUMKMP Kota Balikpapan diukur melalui indikator kinerja yang mengalami beberapa kali penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Kota Balikpapan. Penyesuaian ini menyebabkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan indikator kinerja tertentu tidak selalu dapat dibandingkan secara langsung dengan tahun-tahun sebelumnya. Saat ini, DKUMKMP Kota Balikpapan telah menetapkan empat sasaran strategis utama, yaitu::

1. Meningkatnya Pengembangan Potensi Koperasi Berkualitas
2. Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro
3. Meningkatnya Pertumbuhan Produktivitas Industri Pengolahan
4. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

**Tabel. 2.3 CAPAIAN IKU DKUMKMP**

CAPAIAN IKU 2022						
No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian	Realisasi	Capaian %
1	MENINGKATNYA KOPERASI BERKUALITAS	PERSENTASE KOPERASI BERKUALITAS	Persen	19.87	20	101%
2	MENINGKATNYA PEMBINAAN USAHA MIKRO DAERAH MELALUI PENINGKATAN OMSET UMK	PERSENTASE PERTUMBUHAN OMSET UMK	Persen	5.27	10.96	208%
3	MENINGKATNYA INVESTASI TERHADAP IKM	PERSENTASE PERTUMBUHAN INVESTASI IKM	Persen	0.02	6.92	34600%
4	MENINGKATNYA KUALITAS PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI PADA DKUMKMP	NILAI REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	Nilai	27	29.65	110%

CAPAIAN IKU 2023						
No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	Persen	100%	75.00%	75.00%
2	Transformasi usaha mikro dari informal ke formal	Persentase usaha mikro yang bertrasnformasi dari informal ke formal	Persen	4.07%	6.71%	164.86%
3	Meningkatnya Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor industri Pengolahan	Persentase Kontribusi PDRB Industri pengolahan	Persen	48.20%	47.22%	97.97%
4	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DKUMKMP	Nilai	78.9	67.26	85.25%

CAPAIAN IKU 2024						
No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Pengembangan Potensi Koperasi Berkualitas	Persentase Pengembangan Potensi Koperasi Berkualitas	%	50.77	50.26	99.00%
2	Meningkatnya produktivitas usaha mikro	Persentase produktivitas usaha mikro	%	3.00	3.72	124.00%
3	Meningkatnya pertumbuhan produktivitas industri pengolahan	Realisasi pertumbuhan produktivitas industri pengolahan	%	2.00	2.80	140.00%
4	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	67.50	63.30	93.78%

**Tabel 2.4**  
**T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**

PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN			REALISASI			CAPAIAN		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	-	50,000,000	100,000,000	-	48,467,700	100,000,000	0.00%	96.94%	100.00%
<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	50,000,000	100,000,000	-	48,467,700	100,000,000	0.00%	96.94%	100.00%
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	50,000,000	100,000,000		48,467,700	100,000,000	0.00%	96.94%	100.00%
<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	268,125,250	268,117,350	400,000,000	256,981,172	259,552,252	383,249,719	95.84%	96.81%	95.81%
<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	268,125,250	268,117,350	400,000,000	256,981,172	259,552,252	383,249,719	95.84%	96.81%	95.81%
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	83,125,500	83,124,700		78,334,800	82,699,660		94.24%	99.49%	0.00%
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	184,999,750	184,992,650		178,646,372	176,852,592		96.57%	95.60%	0.00%
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi			250,000,000			239,671,419	0.00%	0.00%	95.87%
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			150,000,000			143,578,300	0.00%	0.00%	95.72%
<b>2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	404,200,000	0	0	324,293,090	0	0	80.23%	0.00%	0.00%
2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	202,100,000	0	0	156,228,525	0	0	77.30%	0.00%	0.00%
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	202,100,000			156,228,525			77.30%	0.00%	0.00%
2.17.05.2.02 Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	202,100,000	0	0	168,064,565	0	0	83.16%	0.00%	0.00%
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	202,100,000			168,064,565			83.16%	0.00%	#DIV/0!



PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN			REALISASI			CAPAIAN		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	-	149,999,998	100,000,000	-	144,358,190	97,652,748	0.00%	96.24%	97.65%
<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	149,999,998	100,000,000	-	144,358,190	97,652,748	0.00%	96.24%	97.65%
Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		149,999,998			144,358,190		0.00%	96.24%	0.00%
Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan			100,000,000			97,652,748	0.00%	0.00%	97.65%
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	-	150,000,000	250,000,000	-	148,146,552	242,575,700	0.00%	98.76%	97.03%
<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	150,000,000	250,000,000	-	148,146,552	242,575,700	0.00%	98.76%	97.03%
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		150,000,000	250,000,000		148,146,552	242,575,700	0.00%	98.76%	97.03%
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	6,506,719,600	1,705,200,000	2,404,400,000	5,903,096,844	1,311,105,194	2,109,174,091	90.72%	76.89%	87.72%
<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	6,506,719,600	1,705,200,000	2,404,400,000	5,903,096,844	1,311,105,194	2,109,174,091	90.72%	76.89%	87.72%
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	5,164,375,000	1,000,000,000		4,768,787,510	735,162,756		92.34%	73.52%	
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	122,999,750	125,000,000	125,000,000	90,504,750	124,212,970	124,800,000	73.58%	99.37%	99.84%
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro			100,000,000			99,000,000	0.00%	0.00%	99.00%
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	348,000,000	380,200,000	500,000,000	228,949,405	271,962,467	288,094,158	65.79%	71.53%	57.62%
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	871,344,850	200,000,000	350,000,000	814,855,179	179,767,001	300,492,723	93.52%	89.88%	85.86%
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan			1,329,400,000			1,296,787,210	0.00%	0.00%	97.55%
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	2,651,630,850	5,880,081,613	4,918,915,628	2,047,540,467	5,409,913,466	4,736,185,161	77.22%	92.00%	96.29%
<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	2,651,630,850	5,880,081,613	4,918,915,628	2,047,540,467	5,409,913,466	4,736,185,161	77.22%	92.00%	96.29%
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	2,651,630,850	5,880,081,613	4,918,915,628	2,047,540,467	5,409,913,466	4,736,185,161	77.22%	92.00%	96.29%

PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN			REALISASI			CAPAIAN		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>16,836,422,360</b>	<b>5,348,001,687</b>	<b>7,171,063,131</b>	<b>14,413,127,124</b>	<b>5,243,394,467</b>	<b>6,648,825,110</b>	<b>85.61%</b>	<b>98.04%</b>	<b>92.72%</b>
<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>16,836,422,360</b>	<b>5,348,001,687</b>	<b>7,171,063,131</b>	<b>14,413,127,124</b>	<b>5,243,394,467</b>	<b>6,648,825,110</b>	<b>85.61%</b>	<b>98.04%</b>	<b>92.72%</b>
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		200,000,000	350,000,000		194,209,509	343,663,550	<b>0.00%</b>	<b>97.10%</b>	<b>98.19%</b>
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	195,000,000	2,459,862,600	856,612,000	192,650,000	2,424,607,677	842,752,637	<b>98.79%</b>	<b>98.57%</b>	<b>98.38%</b>
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1,302,173,173		1,641,691,131	1,204,967,001		1,629,422,000	<b>92.54%</b>	<b>0.00%</b>	<b>99.25%</b>
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	14,028,852,000		2,222,760,000	11,755,083,015		1,816,036,989	<b>83.79%</b>	<b>0.00%</b>	<b>81.70%</b>
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			100,000,000			93,194,873	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>93.19%</b>
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1,310,397,187	2,688,139,087	2,000,000,000	1,260,427,108	2,624,577,281	1,923,755,061	<b>96.19%</b>	<b>97.64%</b>	<b>96.19%</b>
<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>115,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>84,400,000</b>	<b>83,714,900</b>	<b>74,789,426</b>	<b>83,005,000</b>	<b>72.80%</b>	<b>74.79%</b>	<b>98.35%</b>
<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>115,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>84,400,000</b>	<b>83,714,900</b>	<b>74,789,426</b>	<b>83,005,000</b>	<b>72.80%</b>	<b>74.79%</b>	<b>98.35%</b>
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	115,000,000	100,000,000	84,400,000	83,714,900	74,789,426	83,005,000	<b>72.80%</b>	<b>74.79%</b>	<b>98.35%</b>
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>210,000,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>183,988,000</b>	<b>194,604,606</b>	<b>146,699,517</b>	<b>173,246,001</b>	<b>92.67%</b>	<b>97.80%</b>	<b>94.16%</b>
<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>210,000,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>183,988,000</b>	<b>194,604,606</b>	<b>146,699,517</b>	<b>173,246,001</b>	<b>92.67%</b>	<b>97.80%</b>	<b>94.16%</b>
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	135,000,000	50,000,000	23,988,000	133,268,606	48,493,157	20,430,001	<b>98.72%</b>	<b>96.99%</b>	<b>85.17%</b>
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	75,000,000	50,000,000	110,000,000	61,336,000	48,611,360	106,782,500	<b>81.78%</b>	<b>97.22%</b>	<b>97.08%</b>
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		50,000,000	50,000,000		49,595,000	46,033,500	<b>0.00%</b>	<b>99.19%</b>	<b>92.07%</b>

PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN			REALISASI			CAPAIAN		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9,375,976,815</b>	<b>9,658,098,900</b>	<b>10,235,744,120</b>	<b>7,481,075,148</b>	<b>7,725,235,382</b>	<b>9,270,700,568</b>	<b>79.79%</b>	<b>79.99%</b>	<b>90.57%</b>
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6,513,621,815</b>	<b>6,518,703,400</b>	<b>6,220,221,720</b>	<b>4,990,705,171</b>	<b>4,979,276,674</b>	<b>5,652,736,006</b>	<b>76.62%</b>	<b>76.38%</b>	<b>90.88%</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,513,621,815	6,518,703,400	6,220,221,720	4,990,705,171	4,979,276,674	5,652,736,006	<b>76.62%</b>	<b>76.38%</b>	<b>90.88%</b>
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>314,981,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>278,480,708</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>88.41%</b>
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			64,981,000			62,195,000	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>95.71%</b>
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			250,000,000			216,285,708	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>86.51%</b>
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1,092,355,000</b>	<b>1,041,700,000</b>	<b>1,383,637,014</b>	<b>1,028,738,972</b>	<b>920,132,405</b>	<b>1,272,526,899</b>	<b>94.18%</b>	<b>88.33%</b>	<b>91.97%</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20,000,000	20,000,000	20,000,000	19,345,150	19,802,844	17,860,000	<b>96.73%</b>	<b>99.01%</b>	<b>89.30%</b>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	347,355,000	100,000,000	119,990,900	301,382,500	98,640,150	116,500,000	<b>86.76%</b>	<b>98.64%</b>	<b>97.09%</b>
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		5,000,000	7,474,300		4,900,650	7,465,487	<b>0.00%</b>	<b>98.01%</b>	<b>99.88%</b>
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	229,500,000	259,200,000	228,581,376	221,273,233	194,478,850	188,316,450	<b>96.42%</b>	<b>75.03%</b>	<b>82.38%</b>
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	125,000,000	105,000,000	125,000,000	119,567,660	88,275,950	92,286,600	<b>95.65%</b>	<b>84.07%</b>	<b>73.83%</b>
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50,000,000	50,000,000	305,628,000	46,737,400	48,445,900	295,475,000	<b>93.47%</b>	<b>96.89%</b>	<b>96.68%</b>
Penyediaan Bahan/Material			9,679,100			9,119,000	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>94.21%</b>
Fasilitasi Kunjungan Tamu		22,500,000	100,000,000		11,952,450	80,470,000	<b>0.00%</b>	<b>53.12%</b>	<b>80.47%</b>
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	320,500,000	480,000,000	467,283,338	320,433,029	453,635,611	465,034,362	<b>99.98%</b>	<b>94.51%</b>	<b>99.52%</b>
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1,090,000,000</b>	<b>250,000,000</b>	<b>453,370,400</b>	<b>836,577,737</b>	<b>245,800,150</b>	<b>440,702,000</b>	<b>76.75%</b>	<b>98.32%</b>	<b>97.21%</b>
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10,000,000		249,600,000	10,000,000		247,752,000	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>99.26%</b>
Pengadaan Mebel	230,000,000		56,070,400	108,923,852		55,100,000	<b>47.36%</b>	<b>0.00%</b>	<b>98.27%</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	850,000,000	250,000,000	147,700,000	717,653,885	245,800,150	137,850,000	<b>84.43%</b>	<b>98.32%</b>	<b>93.33%</b>
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>-</b>	<b>1,035,300,000</b>	<b>1,038,557,400</b>	<b>-</b>	<b>875,480,603</b>	<b>924,745,934</b>	<b>0.00%</b>	<b>84.56%</b>	<b>89.04%</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		200,000,000	300,000,000		134,351,946	215,178,579	<b>0.00%</b>	<b>67.18%</b>	<b>71.73%</b>
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		825,300,000	728,557,400		731,128,657	699,567,355	<b>0.00%</b>	<b>88.59%</b>	<b>96.02%</b>
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>680,000,000</b>	<b>812,395,500</b>	<b>824,976,586</b>	<b>625,053,268</b>	<b>704,545,550</b>	<b>701,509,021</b>	<b>91.92%</b>	<b>86.72%</b>	<b>85.03%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	300,000,000	300,000,000	319,745,300	258,180,218	269,318,110	234,205,921	<b>86.06%</b>	<b>89.77%</b>	<b>73.25%</b>
Pemeliharaan Mebel	20,000,000		20,000,000	19,800,000		19,600,000	<b>99.00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>98.00%</b>
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin lainnya	130,000,000	192,395,500	160,233,286	119,296,050	116,739,950	126,687,900	<b>91.77%</b>	<b>60.68%</b>	<b>79.06%</b>
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	230,000,000	320,000,000	275,000,000	227,777,000	318,487,490	272,171,000	<b>99.03%</b>	<b>99.53%</b>	<b>98.97%</b>
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			49,998,000			48,844,200	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>97.69%</b>
	<b>36,368,074,875</b>	<b>23,459,499,548</b>	<b>25,848,510,879</b>	<b>30,704,433,351</b>	<b>20,511,662,146</b>	<b>23,844,614,098</b>	<b>84.43%</b>	<b>87.43%</b>	<b>92.25%</b>

a. Capaian Kinerja Koperasi

Sasaran strategis pertama yaitu " Meningkatkan Pengembangan Potensi Koperasi Berkualitas " diukur dengan indikator sasaran “Persentase Pengembangan Potensi Koperasi Berkualitas “

Tabel : 2.5 Perkembangan Koperasi

No	Uraian	REALISASI			
		2021	2022	2023	2024
1	Volume usaha koperasi daerah (Rp)	236,234,104,574	123,097,690,855	174,325,492,366	299,555,328,774
2	Koperasi Aktif (ODS) Binaan Kota Balikpapan	494	435	441	456
3	Koperasi Tidak Aktif, (ODS) Binaan Kota Balikpapan	110	147	147	147
4	seluruh koperasi (aktif dan tidak aktif binaan kota Balikpapan)	494	582	588	603
5	koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT,volume usaha dan asset (Binaan Balikpapan)	100	87	75	80
6	Koperasi yang melaksanakan RAT tahun berjalan (Binaan Balikpapan)	100	87	68	80
7	koperasi yang meningkat status kesehatannya di tahun N	12	12	12	15
8	SDM yang meningkat kapasitasnya	75	134	130	197
9	KSP/ USP yang dinilai kesehatannya tahun N	12	13	12	26
10	UKM anggota koperasi yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	0	22	25	30
11	Koperasi yang di periksa dan diawasi	97	87	11	26
12	Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Bersertifikat) Diklat	150	125	165	177
13	Koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan	1	1	1	1
14	Koperasi yang telah di terbitkan sertifikat NIK (tidak termasuk perpanjangan NIK)	18	7	1	5
15	Koperasi yang telah diberikan dukungan fasilitasi Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	150	80	1	45
17	pengurus Koperasi (ODS) Binaan Kota Balikpapan	296	1305	1320	1365
18	Pengawas Koperasi (Berdasarkan uji sampling RAT)	76	1305	180	207
19	Manajer Koperasi (ODS) Binaan Kota Balikpapan	27	19	15	17
20	Karyawan Koperasi (ODS) Binaan Kota Balikpapan	373	187	226	340

Kinerja pengembangan koperasi di Kota Balikpapan selama empat tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup positif. Volume usaha koperasi daerah terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, mencerminkan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi di sektor koperasi. Hal ini didukung oleh bertambahnya jumlah koperasi aktif yang terus dipertahankan agar sesuai dengan prinsip koperasi dan regulasi yang berlaku.

Dalam aspek kelembagaan, dilakukan upaya pengurangan jumlah koperasi tidak aktif melalui pembinaan intensif. Selain itu, jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya, baik melalui pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) maupun peningkatan volume usaha, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola yang baik. Kesadaran koperasi dalam melaksanakan RAT juga mengalami peningkatan, sehingga mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi.

Program pengembangan kapasitas sumber daya manusia juga berjalan efektif, tercermin dari meningkatnya jumlah SDM koperasi yang mengikuti pelatihan

perkoperasian. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola koperasi agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan persaingan pasar.

Dari sisi pengawasan dan pengendalian, jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi terus meningkat, yang menandakan adanya penguatan fungsi pengawasan oleh dinas terkait. Kegiatan pendidikan dan pelatihan berbasis sertifikasi juga mulai diterapkan untuk memastikan standar kompetensi pengelola koperasi terpenuhi. Selain itu, proses legalisasi koperasi melalui penerbitan Nomor Induk Koperasi (NIK) dan penetapan badan hukum juga mengalami perkembangan positif, sehingga memperkuat aspek legalitas koperasi.

Dukungan terhadap peningkatan usaha koperasi juga tampak dari bertambahnya jumlah unit usaha dan karyawan koperasi yang terserap dalam kegiatan ekonomi. Hal ini menandakan bahwa koperasi tidak hanya menjadi wadah simpan pinjam, tetapi juga mampu menggerakkan usaha produktif di berbagai sektor. Keseluruhan capaian ini menunjukkan bahwa program pembinaan, pengawasan, pendidikan, serta pemberdayaan koperasi di Kota Balikpapan berjalan secara berkesinambungan untuk mendorong koperasi yang sehat, mandiri, dan berdaya saing.

Tabel 2.6 Koperasi Perkecamatan

No	Tahun	Kecamatan Balikpapan Selatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Kecamatan Balikpapan Kota	Kecamatan Balikpapan Barat	Kecamatan Balikpapan Tengah	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah
1	2021	89	44	146	61	64	83	487
2	2022	81	40	141	37	61	75	435
3	2023	82	40	144	36	62	77	441
4	2024	91	43	146	36	62	78	456

Sebaran jumlah koperasi di Kota Balikpapan selama periode empat tahun terakhir menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan variasi antar kecamatan. Kecamatan Balikpapan Kota secara konsisten memiliki jumlah koperasi tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya, menandakan tingginya aktivitas perkoperasian di pusat kota. Hal ini sejalan dengan peran strategis wilayah tersebut sebagai pusat perekonomian kota.

Kecamatan Balikpapan Selatan menempati posisi kedua dengan jumlah koperasi yang cukup signifikan dan menunjukkan kecenderungan peningkatan pada tahun terakhir. Sementara itu, kecamatan lainnya seperti Balikpapan Timur, Barat, Tengah, dan Utara memiliki jumlah koperasi yang lebih kecil dibandingkan dua kecamatan utama, namun tetap memberikan kontribusi terhadap total keseluruhan koperasi di kota ini.

Secara umum jumlah total koperasi di seluruh Kota Balikpapan relatif terjaga dari tahun ke tahun. Stabilitas ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam

menjaga eksistensi koperasi meskipun menghadapi tantangan ekonomi dan perubahan pola usaha. Upaya pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan yang terus dilakukan menjadi faktor pendukung keberlangsungan koperasi di seluruh kecamatan.

Perkembangan koperasi di Kota Balikpapan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang nyata. Pada tahun 2021, jumlah pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi yang memperoleh sertifikat kompetensi meningkat pesat dibanding tahun sebelumnya, bahkan melampaui target yang ditetapkan. Dari sisi kelembagaan, jumlah koperasi aktif juga terus bertambah berdasarkan data Online Data System (ODS) Kementerian Koperasi dan UKM, sementara jumlah koperasi yang tidak aktif secara bertahap menurun. Pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai program strategis yang menitikberatkan pada penguatan kapasitas pengurus, pengawas, dan pengelola agar mampu mengelola koperasi secara profesional, akuntabel, serta menjaga kepercayaan anggota.

Pada tahun 2022, kualitas koperasi semakin membaik yang tercermin dari meningkatnya jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dibanding tahun sebelumnya. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan koperasi melaporkan dokumen RAT serta melakukan pengawasan khusus terhadap koperasi tertentu. Selain itu, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian berkontribusi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi melalui pelatihan pelaporan RAT, perpajakan, hingga pengembangan digitalisasi usaha bagi UMKM anggota koperasi. Langkah-langkah ini memperkuat profesionalisme dan kualitas koperasi di Kota Balikpapan.

Memasuki tahun 2023, DKUMKMP Kota Balikpapan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan kinerja koperasi. Kegiatan utama meliputi pelatihan manajemen usaha koperasi simpan pinjam, rapat koordinasi pengawasan, bimbingan teknis pemeriksaan kesehatan, pelatihan RAT, penilaian kesehatan koperasi, pelatihan kewirausahaan bagi anggota koperasi, serta pelatihan pemeriksaan kesehatan bagi SDM DKUMKMP. Kegiatan ini membekali pengurus koperasi dengan keterampilan penting untuk memperbaiki tata kelola dan profil risiko koperasi, meskipun beberapa kegiatan belum terlaksana sepenuhnya karena keterbatasan anggaran.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Balikpapan melalui DKUMKMP terus melanjutkan program peningkatan kualitas koperasi melalui pelatihan, pendampingan, dan pendataan koperasi. Kegiatan seperti diklat sertifikasi bagi manajer koperasi, pelatihan manajemen risiko, pelatihan RAT, penguatan standar operasional, pemeriksaan kesehatan koperasi, pelatihan perencanaan bisnis, serta peringatan Hari Koperasi Nasional menjadi upaya berkelanjutan dalam meningkatkan profesionalisme koperasi. Berbagai inisiatif



tersebut semakin memperkuat kelembagaan koperasi sebagai pilar penting perekonomian daerah..

a. Capaian Kinerja UMKM

Sasaran strategis pertama yaitu "Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro " diukur dengan indikator sasaran “Persentase produktivitas usaha mikro “

Tabel 2.7 Perkembangan UMKM

No	Uraian	REALISASI			
		2021	2022	2023	2024
1	usaha mikro keseluruhan	47,054	60,977	73,300	87,397
2	omset UMK (mikro)	1,393,189,927,966	1,545,934,000,000	2,050,174,882,510	2,125,596,748,942
3	usaha mikro yang menjadi wirausaha (Pelaku usaha sampai dengan tahun N)	29,083	42,988	55,311	14097
11	Usaha Mikro bermitra	180	31	60	60
12	usaha Mikro yang diberikan standarisasi dan sertifikasi	368	414	110	74
16	Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	100	296	200	190
20	Usaha Mikro Sektor Jasa				
	Balikpapan Selatan	649	3,818	1,088	1300
	Balikpapan Kota	244	1,211	717	830
	Balikpapan Timur	345	1,056	673	767
	Balikpapan Utara	768	2,556	1,100	1561
	Balikpapan Tengah	325	1,200	499	663
	Balikpapan Barat	267	557	350	554
	Jumlah	2,598	10,398	4,427	5675
21	Usaha Mikro Sektor Industri				
	Balikpapan Selatan	616	530	600	729
	Balikpapan Kota	245	157	282	537
	Balikpapan Timur	464	262	465	512
	Balikpapan Utara	658	544	898	1,070
	Balikpapan Tengah	445	222	363	576
	Balikpapan Barat	170	174	357	452
	Jumlah	2,598	1,889	2,965	3,876
22	Usaha Mikro Sektor Dagang				
	Balikpapan Selatan	2,600	3,234	1,097	1041
	Balikpapan Kota	2,071	954	583	682
	Balikpapan Timur	2,331	894	821	544
	Balikpapan Utara	3,160	2,340	1,186	533
	Balikpapan Tengah	1,712	1,217	589	573
	Balikpapan Barat	2,442	719	655	1173
	Jumlah	14,316	9,358	4,931	4,546
29	IKM yang mendapatkan Merk	20	20	20	20
30	IKM yang mendapatkan Hak Cipta	5	6	6	0
31	IKM yang mendapatkan Label Halal	15	20	60	20
32	Gallery dan showcase	5	9	9	10
33	IKM batik (Binaan Dekranasda)	12	12	12	13
34	IKM bordir (Binaan Dekranasda)	3	5	5	5
35	IKM ukiran, rotan /kerajinan (Binaan Dekranasda)	4	6	6	6
36	motif batik (berdasarkan HAKI) Difasilitasi Dinas	15	21	27	33

Perkembangan usaha di sebuah wilayah dari tahun 2021 hingga 2024. Secara keseluruhan, terdapat pertumbuhan yang stabil pada jumlah usaha di wilayah tersebut. Peningkatan juga terlihat pada omset usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK), serta jumlah wirausaha baru yang muncul setiap tahunnya.

Pola perkembangan yang beragam ditunjukkan oleh beberapa sektor usaha. Sektor jasa mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022, diikuti penurunan pada tahun 2023, dan kembali menunjukkan pertumbuhan pada tahun 2024. Sedangkan sektor industri dan perdagangan menunjukkan tren yang lebih konsisten, dengan jumlah pelaku usaha yang terus meningkat setiap tahunnya.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk mendukung ekosistem usaha. Hal ini termasuk program kemitraan, standarisasi dan sertifikasi, serta pemberian fasilitas pelatihan. Fasilitasi yang diberikan seperti program IKM yang

mendapatkan merek, hak cipta, dan label halal. Terdapat pula perkembangan positif pada produk-produk kerajinan seperti batik dan bordir, serta adanya upaya untuk mendaftarkan motif batik berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Tabel. 2.8 UMKM PERKECAMATAN

Kecamatan	USAHA MIKRO			
	2021	2022	2023	2024
Balikpapan Selatan	3,655	4,502	2,785	3,070
Balikpapan Kota	2,560	1,437	1,582	2,051
Balikpapan Timur	3,134	1,594	1,959	1,783
Balikpapan Utara	3,095	3,718	3,184	1,812
Balikpapan Tengah	3,126	1,567	1,451	1,579
Balikpapan Barat	3,942	1,105	1,362	3,802
Jumlah	19,512	13,923	12,323	14,097
Kecamatan	USAHA MIKRO KECIL			
	2021	2022	2023	2024
Balikpapan Selatan	3,655	7,582	3,256	3,551
Balikpapan Kota	2,560	2,322	1,705	2,211
Balikpapan Timur	3,134	2,212	2,115	1,877
Balikpapan Utara	3,095	5,440	3,507	2,128
Balikpapan Tengah	3,126	2,639	1,590	1,704
Balikpapan Barat	3,942	1,450	1,441	3,868
Jumlah	19,512	21,645	13,614	15,339
Kecamatan	USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH			
	2021	2022	2023	2024
Balikpapan Selatan	3,655	7,884	3,305	3,624
Balikpapan Kota	2,560	2,461	1,724	2,232
Balikpapan Timur	3,134	2,407	2,137	1,897
Balikpapan Utara	3,095	5,679	3,530	2,176
Balikpapan Tengah	3,126	2,693	1,593	1,715
Balikpapan Barat	3,942	1,554	1,443	3,881
Jumlah	19,512	22,678	13,732	15,525
Kecamatan	USAHA MIKRO			
	Jumlah seluruh Usaha Mikro s/d Th 2021	Jumlah seluruh Usaha Mikro s/d Th 2022	Jumlah seluruh Usaha Mikro s/d Th 2023	Jumlah seluruh Usaha Mikro s/d Th 2024
Balikpapan Selatan	9,770	14,272	17,057	20,127
Balikpapan Kota	6,163	7,600	9,182	11,233
Balikpapan Timur	7,243	8,837	10,796	12,579
Balikpapan Utara	7,852	11,570	14,754	16,566
Balikpapan Tengah	8,074	9,641	11,092	12,671
Balikpapan Barat	7,952	9,057	10,419	14,221
Jumlah	47,054	60,977	73,300	87,397
Kecamatan	USAHA MIKRO KECIL			
	Jumlah seluruh Usaha Mikro dan Kecil s/d Th 2021	Jumlah seluruh Usaha Mikro dan Kecil s/d Th 2022	Jumlah seluruh Usaha Mikro dan Kecil s/d Th 2023	Jumlah seluruh Usaha Mikro dan Kecil s/d Th 2024
Balikpapan Selatan	9,770	17,352	20,608	24,159
Balikpapan Kota	6,163	8,485	10,190	12,401
Balikpapan Timur	7,243	9,455	11,570	13,447
Balikpapan Utara	7,852	13,292	16,799	18,927
Balikpapan Tengah	8,074	10,713	12,303	14,007
Balikpapan Barat	7,952	9,402	10,843	14,711
Jumlah	47,054	68,699	82,313	97,652
Kecamatan	USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH			
	Jumlah seluruh Usaha Mikro dan Kecil s/d Th 2021	Jumlah seluruh Usaha Mikro dan Kecil s/d Th 2022	Jumlah seluruh Usaha Mikro dan Kecil s/d Th 2023	Jumlah seluruh Usaha Mikro dan Kecil s/d Th 2024
Balikpapan Selatan	9,770	17,654	20,959	24,583
Balikpapan Kota	6,163	8,624	10,348	12,580
Balikpapan Timur	7,243	9,650	11,787	13,684
Balikpapan Utara	7,852	13,531	17,061	19,237
Balikpapan Tengah	8,074	10,767	12,360	14,075
Balikpapan Barat	7,952	9,506	10,949	14,830
Jumlah	47,054	69,732	83,464	98,989

gambaran umum mengenai perkembangan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah di berbagai kecamatan dari tahun 2021 hingga 2024. Secara keseluruhan, terjadi pertumbuhan yang berkelanjutan pada jumlah usaha di



wilayah tersebut, meskipun dengan tren yang bervariasi di setiap kecamatan. Beberapa kecamatan menunjukkan pertumbuhan yang stabil, sementara yang lain mengalami naik-turun dari tahun ke tahun. Peningkatan kumulatif ini, yang juga didorong oleh sektor usaha mikro sebagai fondasi, mengindikasikan adanya dinamika dan vitalitas ekonomi yang kuat, serta mencerminkan semangat kewirausahaan dan dukungan terhadap pertumbuhan sektor usaha dari berbagai skala di wilayah tersebut.

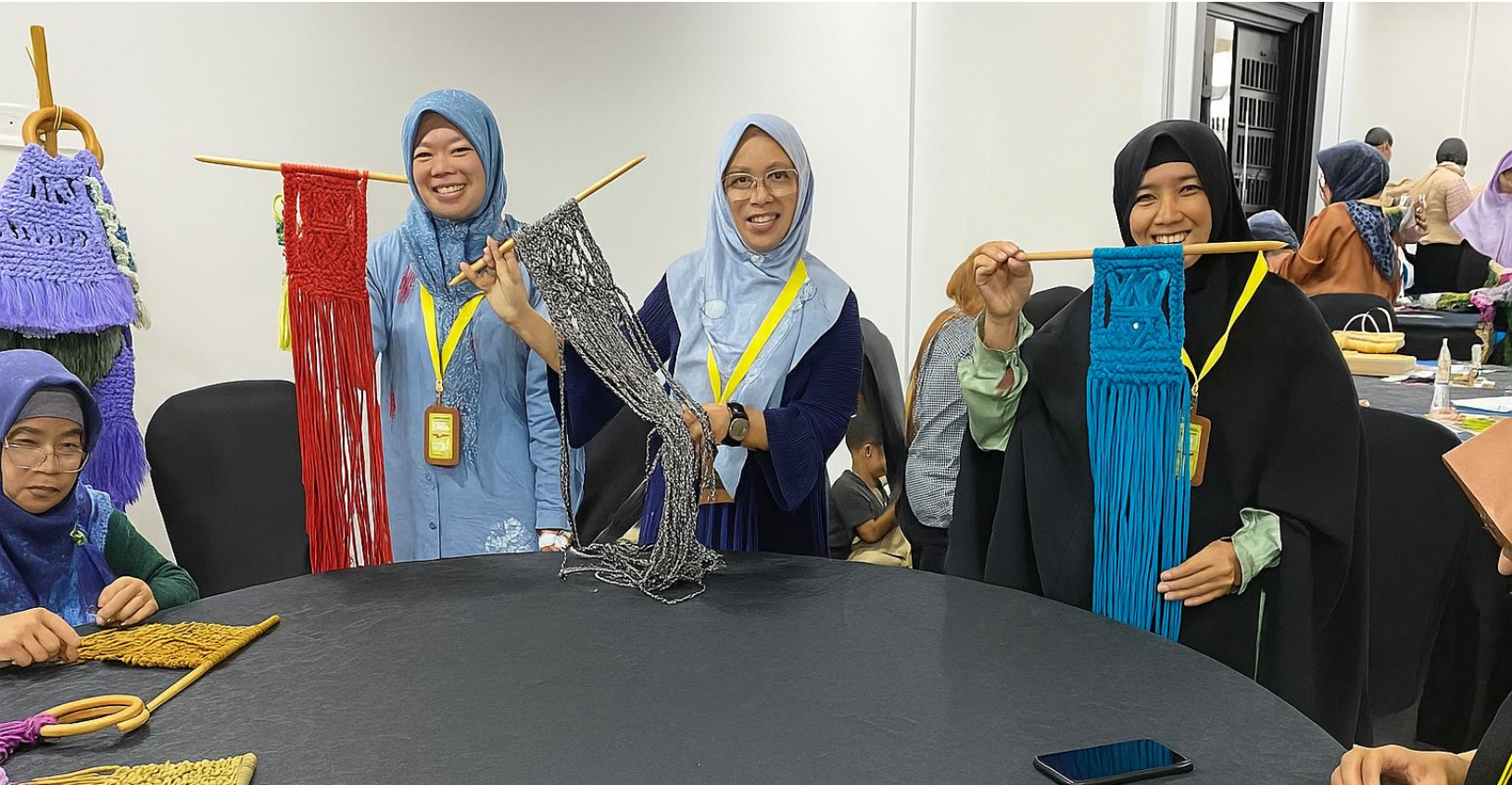
Tabel. 2.9  
KREDIT UMUM

No	Tahun	Jumlah Rekening	Total Kredit UMKM (Rp Juta)	Total Seluruh Kredit (Rp Juta)	% Total Kredit UMKM terhadap Total Kredit
1	2021	-	8,942,475	30,332,996	29.48
2	2022	53,546	9,554,059	38,050,507	25.11
3	2023	55,834	10,136,949	34,514,021	29.37
4	2024	54,666	10,954,338	31,469,065	34.81

perkembangan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari tahun 2021 hingga 2024. Meskipun jumlah rekening mengalami naik-turun, total kredit yang disalurkan kepada UMKM secara konsisten menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini juga sejalan dengan kenaikan persentase total kredit UMKM terhadap total seluruh kredit, yang menunjukkan bahwa kontribusi UMKM dalam penyerapan kredit semakin signifikan. Secara keseluruhan, data ini merefleksikan adanya tren positif dalam dukungan permodalan bagi UMKM, yang berperan penting dalam menggerakkan perekonomian.

c. Capaian Kinerja Perindustrian

Sasaran strategis pertama yaitu "Meningkatnya Pertumbuhan Produktivitas Industri Pengolahan " diukur dengan indikator sasaran “Realisasi Pertumbuhan Produktivitas Industri Pengolahan “



Tabel. 2.10 Perkembangan Industri

No	Uraian		REALISASI			
			2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Investasi IKM		856,338,000,000	915,620,947,161	1,039,356,014,745	1,177,780,251,102
2	jumlah industri kecil dan menengah tahun N		10	42	75	116
3	jumlah industri kecil dan menengah sampai dengan tahun N		912	954	1,029	1,145
4	Jumlah izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan		44	63	118	130
	Jumlah izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan		912	954	1,029	1,145
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini						
1) Keterkinian informasi industri :						
5	Informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan	(perusahaan)	26	48	124	76
	Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan	(perusahaan)	25	0	52	50
	Tidak menyampaikan informasi industri	(perusahaan)	45	107	244	480
	Total perusahaan yang melapor di SIINas		51	48	176	126
	Jumlah perusahaan yang terdaftar di SIINas		112	155	416	592
2) Kelengkapan informasi industri meliputi :						
6	Informasi produksi dan kapasitas produksi	(RP)	45,725,387,822,280	9,364,136,759,333	12,881,710,661,023	13,588,229,799,190
	Informasi bahan baku dan bahan penolong	(RP)	5,503,805,565,057	26,909,534,024	9,728,489,495,389	9,961,033,470,826
	Informasi bahan bakar/energy	Listrik PLN (RP)	74,043,700,788	43,376,383,683	27,708,298,499	17,104,789,933
		Listrik Non PLN (RP)	71,576,943	268,906,157	414,615,769	447,166,899
		Bahan bakar (RP)	46,775,454,033	141,171,672,773	390,710,354,301	16,398,468,635
		energi terbarukan (RP)	3,135,328	406,617,909	115,928,742	33,456,218
	Informasi tenaga kerja	(orang)	5,975	4,393	4,417	5,385
	Informasi Investasi	(RP)	856,338,000,000	915,620,947,161	1,039,356,014,745	1,177,780,251,102
7	capaian unit terbangun di SIKS		62.99	70.68	70.68	70.68
	capaian unit terbangun di SIKT		41.10	42.47	42.47	42.47
8	jumlah izin industri yang diverifikasi (IUI),(IPUI), (IUKI), (IPKI)		10	13	17	3
9	Data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri dikota SIINas (sampai dengan tahun N)		112	155	416	592

Secara umum, data tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan tren positif pada berbagai indikator industri di Kota Balikpapan. Nilai investasi IKM meningkat signifikan setiap tahunnya, dari Rp856 miliar pada 2021 menjadi lebih dari Rp1,1 triliun pada 2024. Jumlah industri kecil dan menengah juga mengalami peningkatan konsisten, baik dari sisi jumlah unit maupun industri besar yang terdata. Peningkatan ini mencerminkan bertambahnya aktivitas ekonomi, semakin aktifnya pelaku industri dalam memanfaatkan fasilitas pemerintah, serta adanya dukungan kebijakan yang tepat sasaran.

Selain itu, kelengkapan dan keterbaruan informasi industri semakin baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan industri secara berkala, perusahaan yang melapor di SIINas, serta kelengkapan data terkait produksi, bahan baku, energi, investasi, tenaga kerja, hingga nilai tambah industri. Dengan semakin lengkapnya data, pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih kuat untuk melakukan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan industri di Kota Balikpapan secara lebih akurat dan tepat sasaran.

Tabel. 2.11 Pertumbuhan industri

No	Kelompok Industri	2021	2022	2023	2024
1	Hasil Hutan	79	79	79	80
2	Pulp dan Kertas	108	134	134	135
3	Kimia	109	106	107	110
4	Agro	201	204	207	227
5	Logam Mesin dan Perekayasaan	156	167	190	208
6	Alat Angkut	130	139	164	168
7	Tekstil	93	67	67	73
8	Aneka	36	58	81	144
Total		912	954	1029	1145
% Pertumbuhan Industri		1.10	4.61	7.86	11.27

Data perkembangan industri di Kota Balikpapan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2021 hingga 2024. Total jumlah industri yang tercatat pada tahun 2021 sebanyak 912 unit, meningkat menjadi 954 unit pada tahun 2022, 1.029 unit pada tahun 2023, dan mencapai 1.145 unit pada tahun 2024. Peningkatan jumlah industri ini mencerminkan keberhasilan berbagai program penguatan sektor industri yang dijalankan pemerintah daerah. Jika dilihat per kelompok industri, sektor agro menjadi yang paling dominan sepanjang periode ini, meningkat dari 201 unit pada 2021 menjadi 227 unit pada 2024. Sektor logam, mesin, dan perekayasaan juga menunjukkan pertumbuhan kuat, naik dari 156 unit pada 2021 menjadi 208 unit pada 2024, sedangkan industri alat angkut mencatat kenaikan dari 130 unit pada 2021 menjadi 168 unit pada 2024.

Pertumbuhan paling menonjol terlihat pada kelompok industri aneka, yang awalnya hanya 36 unit pada 2021 melonjak signifikan menjadi 144 unit pada 2024. Industri kimia juga meningkat dari 106 unit pada 2021 menjadi 110 unit pada 2024, sedangkan tekstil relatif stabil dengan sedikit kenaikan. Sektor hasil hutan bertahan pada angka 79 unit sepanjang periode tersebut. Secara keseluruhan, laju pertumbuhan industri meningkat setiap tahun, menunjukkan adanya transformasi positif sektor industri di Kota Balikpapan yang didukung oleh kebijakan pembangunan, investasi sarana prasarana, pendampingan teknis, serta program penguatan kapasitas industri lokal yang dilakukan secara berkelanjutan.

c. Capaian Kinerja Sekretariat

Sasaran strategis pertama yaitu "Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerint " diukur dengan indikator sasaran “Nilai SAKIP DKUMKMP “

Tabel 2.12 Nilai SAKIP DKUMKMP

No	Tahun	Realisasi Nilai Sakip
1	2022	80,28
2	2023	67,26
3	2024	63,30
4	2025	68,74

Realisasi nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dari tahun 2022 hingga 2025. Terjadi tren penurunan yang signifikan pada nilai SAKIP dari tahun 2022 hingga 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam hal akuntabilitas dan efektivitas kinerja instansi selama periode tersebut. Namun, pada tahun 2025, terlihat adanya perbaikan yang cukup besar, di mana nilai SAKIP kembali meningkat, menunjukkan adanya upaya dan perbaikan yang berhasil dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP, beberapa saran perbaikan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja. perlu adanya perbaikan pada tujuan dan indikator dalam Renstra agar mencakup keseluruhan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta core business Perangkat Daerah. penting untuk meningkatkan pemantauan terhadap pencapaian target perencanaan kinerja secara berkala. perlu disusun definisi operasional yang lebih jelas untuk setiap indikator kinerja guna memastikan pemahaman yang seragam. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk pengisian data kinerja akan membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi. laporan monitoring dan evaluasi kinerja perlu disempurnakan dengan kesimpulan pencapaian target dan Rencana Aksi Tindak Lanjut yang jelas. keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan dalam mengukur kinerja harus lebih ditingkatkan. Terakhir, perlu adanya sistem pengukuran capaian kinerja yang terintegrasi dengan mekanisme reward dan punishment, serta penyusunan laporan kinerja yang lebih teratur dan berkala.

2.1.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Pelaksanaan program kegiatan Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian memberikan manfaat yang luas bagi berbagai kelompok sasaran diantaranya

- 1. Keluarga kurang mampu, program ini menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peluang usaha, pelatihan keterampilan, serta akses terhadap kemitraan dan pembiayaan yang mendorong kemandirian ekonomi.
- 2. Masyarakat, kehadiran program ini memacu pertumbuhan ekonomi lokal, memperluas lapangan kerja, dan menciptakan ekosistem usaha yang sehat sehingga daya beli masyarakat meningkat.

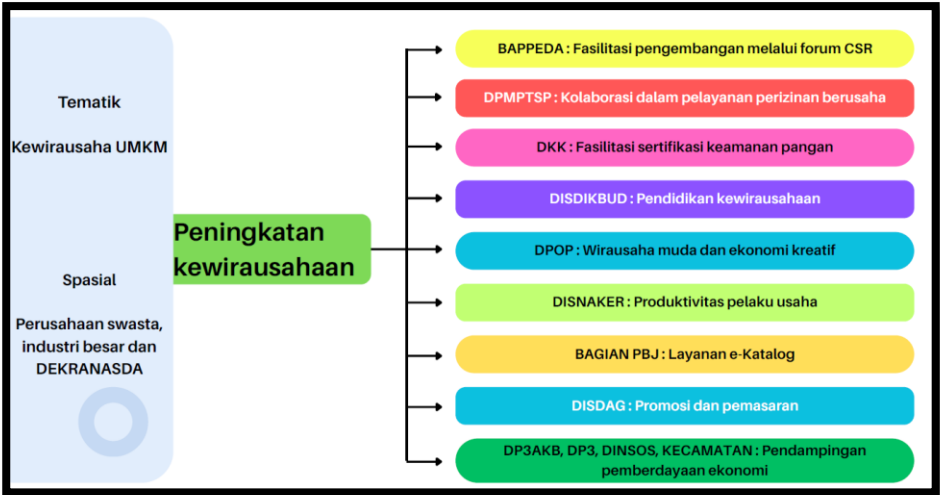


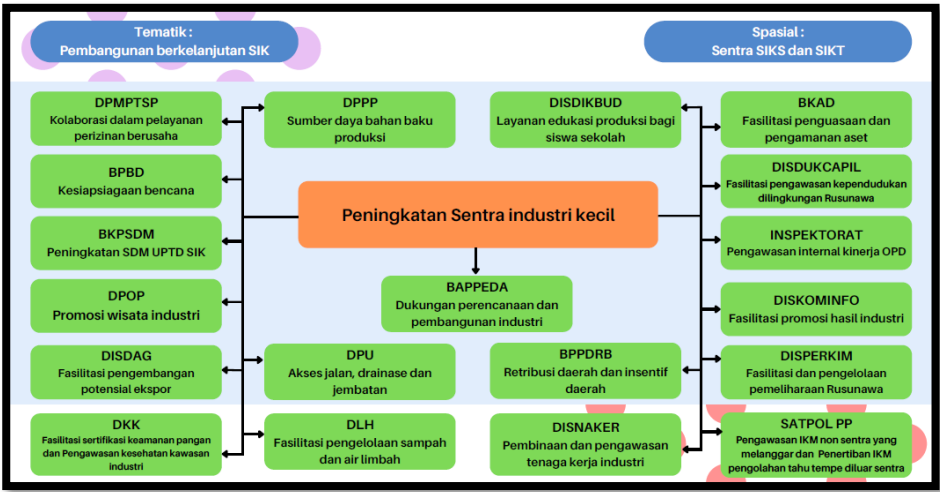
- 3. Koperasi, manfaatnya berupa penguatan kapasitas manajerial, pemahaman tata kelola yang transparan, serta dukungan dalam penerapan prinsip koperasi sehat yang akuntabel.
- 4. Pelaku UMKM, program ini membuka akses terhadap pembinaan, promosi produk, sertifikasi, fasilitasi pameran maupun kemitraan strategis serta jaringan pemasaran yang lebih luas, sehingga daya saing usaha meningkat.
- 5. Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM), kegiatan ini memberikan dorongan pada pengembangan teknologi produksi, peningkatan kualitas produk, dan perluasan pasar melalui

Hal ini tidak hanya memperkuat ekonomi kerakyatan, tetapi juga menciptakan fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Balikpapan secara berkelanjutan.

**2.1.5 DUKUNGAN MITRA PERANGKAT DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN**

Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Balikpapan menyadari bahwa kemajuan sektor ekonomi lokal tidak dapat dicapai sendirian. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi dengan berbagai perangkat daerah menjadi kunci utama dalam memberikan layanan yang optimal. Dukungan ini terwujud dalam beragam bentuk, mulai dari pendampingan legalitas usaha, pelatihan teknis, hingga bantuan pemasaran dan promosi. Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap pelaku usaha mendapatkan dukungan yang komprehensif, dari hulu hingga hilir, untuk mengembangkan usahanya.





Gambar 2.3 dukungan yang komprehensif

Sinergi yang solid ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Balikpapan untuk menciptakan sebuah ekosistem yang terintegrasi. Setiap perangkat daerah membawa keahlian uniknya yang, ketika disatukan, mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh pelaku koperasi, UMKM dan IKM. Melalui kolaborasi ini, layanan yang diberikan tidak hanya sekadar terpusat di satu dinas, tetapi juga menjadi sebuah gerakan bersama untuk memberdayakan masyarakat. Hasilnya, pelaku usaha menjadi lebih tangguh, inovatif, dan mampu bersaing, menjadikan koperasi dan UMKM sebagai fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan yang berkelanjutan

2.2 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis DKUMKMP Kota Balikpapan

DKUMKMP mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan pada saat RPJMD 2025-2029 dan terkait laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelaynan DKUMKMP Kota Balikpapan.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan

Dalam menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- 1. **Strengths (Kekuatan)**
  - a. Pemahaman pelaku usaha tentang koperasi, UMKM, dan industri sudah baik.
  - b. Terdapat produk unggulan UMKM/IKM di Kota Balikpapan.
  - c. Harga produk UMKM terjangkau dan mudah diperdagangkan kembali.
  - d. Industri agro cukup menjanjikan dan memiliki peluang investasi besar.
  - e. Dukungan pemerintah pusat dan provinsi terhadap pengembangan SDM dan infrastruktur koperasi, UMKM, dan industri.

**2. Weaknesses (Kelemahan)**

- a Pemahaman koperasi dan industri bagi pelaku usaha mikro masih terbatas.
- b Ketersediaan bahan baku industri di Kota Balikpapan terbatas.
- c Inovasi produk rendah sehingga mudah ditiru.
- d Sarana produksi masih tradisional dan tempat usaha terbatas.
- e Minimnya akses informasi pasar karena pemanfaatan TIK belum optimal.
- f Terbatasnya modal dan akses lembaga keuangan akibat aspek legalitas usaha.

**3. Opportunities (Peluang)**

- a Lokasi strategis Balikpapan sebagai pusat transportasi darat, laut, dan udara.
- b Sebagai kota penyangga Ibu Kota Negara baru yang memberi peluang produk UMKM/IKM menjadi unggulan.
- c Peluang digitalisasi pendataan/pelaporan koperasi dan UMKM untuk penyajian data real-time.
- d Pengembangan Sentra Industri Kecil Sember dan Teritip untuk mendukung ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja.
- e Ketersediaan bahan baku perikanan dan kelautan yang memadai.
- f Dukungan lembaga keuangan dan perbankan bagi pelaku ekonomi dalam pengembangan usaha.

**4. Threats (Tantangan)**

- a Terbatasnya SDM aparatur dan pelaku koperasi/UMKM/industri yang berkualitas.
- b Pendataan koperasi dan UMKM masih manual.
- c Tidak semua koperasi patuh melaksanakan RAT rutin.
- d Terbatasnya anggaran untuk pelatihan teknis dan program peningkatan daya saing.
- e Kendala umum UMKM: bahan baku mahal, pemasaran terbatas, modal kecil, daya saing rendah terhadap pengusaha besar, dan ketergantungan pada program pemerintah.
- f Rendahnya pemanfaatan digital marketing untuk promosi produk/jasa

**2.2.1 Permasalahan Pelayanan DKUMKMP**

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan DKUMKMP Kota Balikpapan, bahwa Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD merupakan kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena akan berdampak bagi daerah dan masyarakat di masa datang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi, OPD dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di dalam organisasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DKUMKMP Kota Balikpapan berkewajiban merealisasikan visi dan misi Kepala Daerah dengan melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan energi Sumber Daya Mineral sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan secara umum dapat digambarkan pada table dibawah ini:





Tabel 2.13.

T-B.35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab masalah /Akar Masalah
1	Pengelolaan koperasi belum terkelola dengan baik dan profesional	<div>1. Masih banyak koperasi yang belum melaksanakan kewajiban peraturan perundang-undangan.</div> <div>2. Masih lemahnya pengurus dalam mengelola keuangan dan usaha koperasi</div> <div>3. Belum maksimalnya fungsi pengawasan koperasi</div>	<div>1.1. Masih adanya koperasi yang tidak melaksanakan RAT.</div> <div>1.2. Masih adanya koperasi yang belum melakukan pergantian pengurus.</div> <div>2.1. Masih adanya koperasi yang belum memahami pengelolaan keuangan secara akuntabel.</div> <div>2.2. Masih adanya koperasi yang tidak mengurus perizinan usaha OSS RBA.</div> <div>2.3. Masih adanya koperasi yang belum memahami cara menjalankan usaha perkoperasian.</div> <div>3.1 Masih adanya koperasi yang belum tertib menyampaikan laporan tahunan.</div> <div>3.2. Kinerja pengawas koperasi tidak maksimal</div> <div>3.3. Tidak berjalannya fungsi pengawasan internal anggota koperasi</div>
2	Belum terwujudnya usaha mikro yang berdaya saing dan nilai tambah	<div>1. Keterbatasan pengetahuan dan rendahnya keterampilan pengusaha usaha mikro</div> <div>2. Kecilnya peluang kemitraan bagi usaha mikro</div> <div>3. Rendahnya kepemilikan legalitas dan sertifikasi produk usaha mikro</div> <div>4. Rendahnya pemasaran usaha mikro</div>	<div>1.1. Belum memiliki mindset sebagai pengusaha</div> <div>1.2. Ketidakesesuaian data izin usaha dengan kondisi riil lapangan</div> <div>1.3. Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan manajemen</div> <div>2.1. Keterbatasan akses pasar</div> <div>2.2. Tidak mudah mendapatkan akses permodalan</div> <div>2.3. Kurangnya Literasi Digital</div> <div>3.1. Rendahnya kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan</div> <div>3.2.Rendahnya kesadaran dalam pengurusan perizinan berusaha</div> <div>3.3. Rendahnya keinginan generasi muda dalam berwirausaha</div> <div>3.4. Belum memiliki perizinan yang lengkap dan prosedural</div> <div>3.5. Masih banyak yang belum memiliki standar sertifikasi Produk</div> <div>4.1. Rendahnya pemasaran produk usaha mikro</div> <div>4.2. Rendahnya kompetensi pemasaran produk usaha mikro</div> <div>4.3. Kurangnya inovasi produk</div>
3	Belum optimalnya pertumbuhan industri yang berdaya saing dan inklusif	<div>1. Belum terlaksananya perencanaan dan pembangunan industri yang memadai</div> <div>2. Rendahnya kepatuhan pelaku industri dalam pemenuhan administrasi</div> <div>3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana sentra industri kecil</div>	<div>1.1. Belum tersedianya perencanaan pembangunan yang komprehensif</div> <div>1.2. Belum adanya dokumen perencanaan yang dijadikan rujukan</div> <div>1.3 Belum optimalnya Sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan industri kota.</div> <div>2.1. Ketidakesesuaian data izin usaha dengan kondisi riil lapangan</div> <div>2.2. Masih adanya industri yang belum tertib menyampaikan laporan SIINas secara akurat dan tepat waktu</div> <div>2.3. Pola pikir dan komitmen dari SDM Pelaku usaha industri yang belum mendukung kemajuan usaha.</div> <div>3.1. Masih adanya rumah produksi yang belum terbangun sesuai dengan site plan yang ditetapkan.</div> <div>3.2. Masih adanya prasarana, sarana, dan utilitas yang belum terbangun</div> <div>3.3 Masih banyak yang belum memiliki standar sertifikasi Produk dan penguasaan teknologi proses produksi.</div>

### **2.2.2 Isu Strategis**

Isu strategis yang ditentukan DKUMKMP berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi dari permasalahan pelayanan yang terdapat DKUMKMP Kota Balikpapan. Isu strategis yang dihadapi saat ini adalah lemahnya dukungan terhadap pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta usaha mikro) secara terintegrasi dan berkelanjutan. Hal ini terlihat dari pengolahan dan pelaporan data yang belum optimal, kualitas kelembagaan koperasi yang masih rendah, serta administrasi dan manajemen yang belum tertata baik. Selain itu, minimnya sertifikasi bagi pengurus dan pengelola koperasi, kurangnya pendampingan dalam pengurusan perizinan, serta keterbatasan fasilitasi bagi pelaku usaha mikro juga menjadi kendala. Kerja sama antara pelaku usaha mikro dengan pengembang usaha masih belum maksimal, begitu pula dengan upaya meningkatkan daya saing dan memperluas pemasaran produk koperasi dan usaha mikro.

Di sisi lain, belum optimalnya infrastruktur, informasi, standarisasi, dan sinergi dalam penguatan industri juga menjadi isu penting. Pengelolaan data industri masih lemah, pembangunan dan pengembangan sistem informasi seperti SIKS dan SIKT belum berjalan secara maksimal, dan kepemilikan sertifikasi pendukung seperti sertifikasi halal, HKI (paten, hak cipta, merek), GMP/CPPOB, serta SNI masih rendah. Kondisi ini berdampak pada rendahnya daya saing industri sehingga perlu penguatan melalui sinergi program, peningkatan infrastruktur, serta dukungan standarisasi yang lebih baik.



Tabel 2.14 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis DKUMKMP

No	Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	Koperasi dan Usaha Mikro sebagai ketahanan ekonomi daerah	Pengelolaan koperasi belum terkelola dengan baik dan profesional	1. Masih tingginya angka pengangguran	1. Ekonomi Global	1. Produktivitas Rendah	1. Masih besarnya ketergantungan perekonomian daerah pada sektor hulu disertai lambatnya proses hilirisasi dan diversifikasi industri pengolahan berbasis sumber daya alam karena minimnya penciptaan lingkungan usaha industri yang kondusif, kurangnya dukungan insentif fiskal, dan rendahnya penguasaan teknologi, serta keterbatasan pasokan energi, air, dan pangan.	Lemahnya Pendukung Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) Secara Terintegrasi dan Berkelanjutan
		Belum terwujudnya usaha mikro yang berdaya saing dan nilai tambah	2. Masih rendahnya kapasitas entrepreneurship masyarakat	2. Perubahan geopolitik dan peta ekonomi dunia	2. Ketahanan Ekonomi	2. Pengembangan Industri	
2	Produktivitas Industri kecil menengah	Belum optimalnya pertumbuhan industri yang berdaya saing dan inklusif					Belum Optimalnya Infrastruktur, Informasi, Standarisasi dan sinergi dalam Penguatan Industri





Kementerian  
Perindustrian  
REPUBLIK INDONESIA

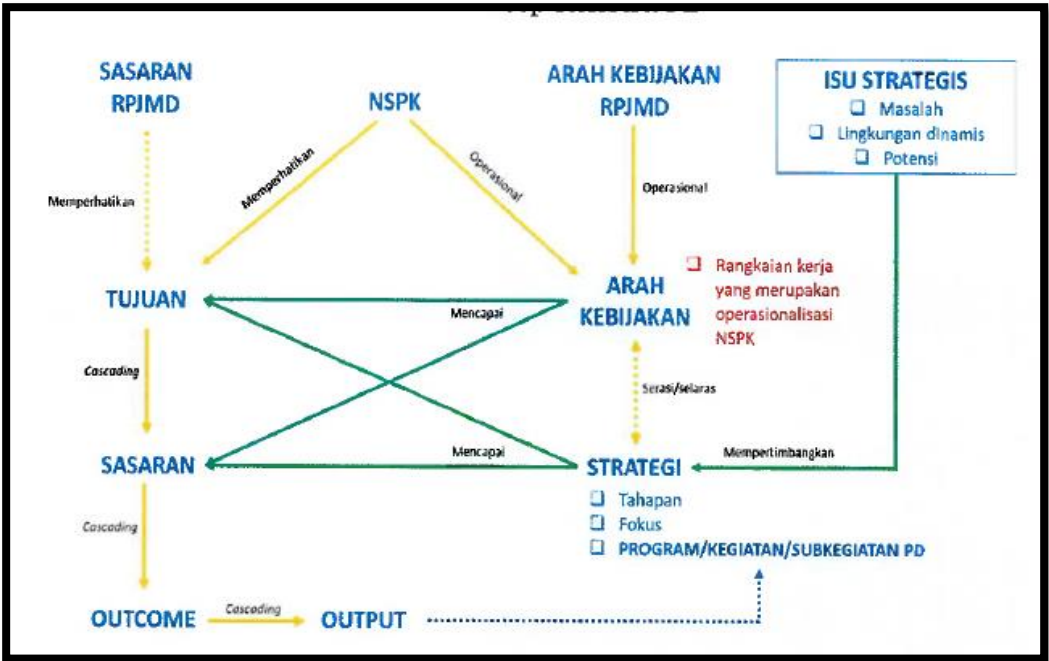
# SENTRA INDUSTRI KECIL TERITIP ( SIKT )

DINAS KOPERASI UMKM DAN PERINDUSTRIAN  
KOTA BALIKPAPAN



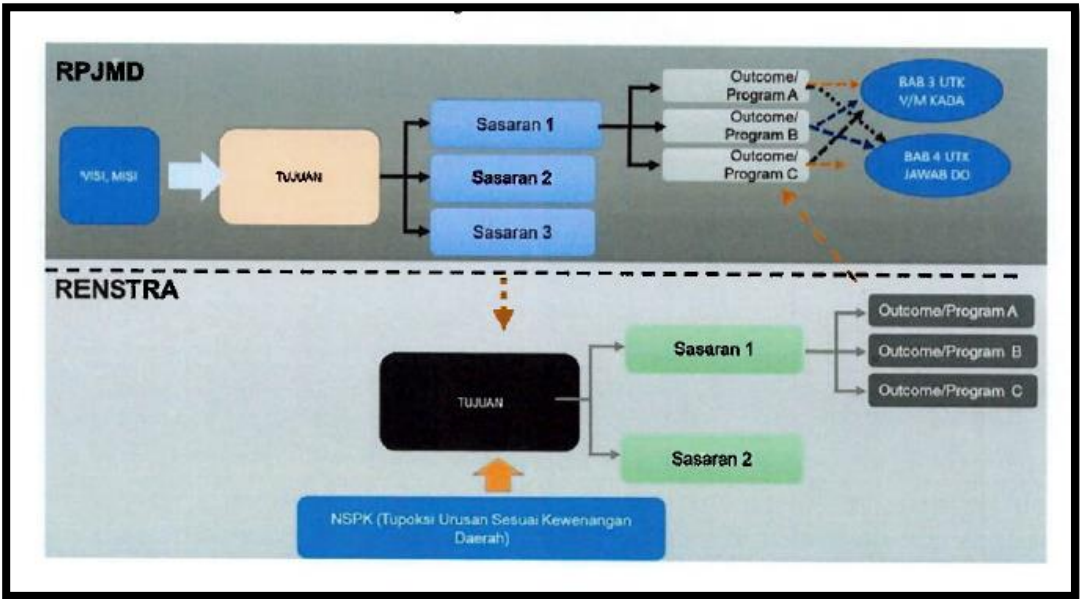
## BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan merupakan tahap yang memiliki prioritas tertinggi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tahap ini menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh dan menjadi salah satu titik kritis (critical point) dalam penyusunan Renstra. Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan tidak hanya menjadi pedoman pelaksanaan, tetapi juga mencerminkan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diharapkan melalui pencapaian berbagai program prioritas.



Gambar 3.1 Konsep Renstra PD

Selaras dengan penerapan penganggaran berbasis kinerja, perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana lebih ditekankan pada target kinerja yang terukur, baik pada tingkat dampak (impact), hasil (outcome), maupun keluaran (output) dari setiap kegiatan, program, dan sasaran. Dengan demikian, setiap proses perencanaan harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, sehingga pelaksanaan program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.



Gambar 3.2 : Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perindustrian (DKUMKMP) Kota Balikpapan berkomitmen mendukung visi dan misi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029. Arah pembangunan Kota Balikpapan berdasarkan **Visi Wali Kota terpilih adalah “Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua dalam Bingkai Madinatul Iman”** dengan mengampu **Misi 4, yaitu: “Mengembangkan perekonomian yang tumbuh berkeadilan untuk semua.”** Setiap strategi dan kebijakan DKUMKMP diarahkan untuk memperkuat sektor koperasi, UMKM, dan perindustrian agar mampu bersaing, tumbuh berkelanjutan, dan mendukung perekonomian daerah Hasil Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

**3.1 Tujuan RENSTRA DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

Renstra DKUMKMP Kota Balikpapan merupakan penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan. Oleh karena itu, perumusan tujuan DKUMKMP harus selaras dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Keselarasan ini dimaksudkan agar seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan DKUMKMP memiliki arah yang jelas, terukur, dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, sekaligus memperkuat kinerja perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Implementasi dari **sasaran RPJMD Kota Balikpapan, yaitu “Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah yang Merata dan Berkelanjutan”**, akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Sejalan dengan hal tersebut, **DKUMKMP menetapkan tujuan selama periode lima tahun, yaitu “Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah sektor koperasi, usaha mikro, dan industri pengolahan.”** Tujuan ini diharapkan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan

**3.2 Sasaran RENSTRA DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya hasil pembangunan daerah atau perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Perumusan sasaran merupakan tahap yang sangat strategis dalam proses perencanaan pembangunan jangka menengah daerah karena menunjukkan tingkat prioritas tertinggi yang menjadi dasar dalam penyusunan kinerja perangkat daerah secara menyeluruh. Melalui perumusan yang tepat, perangkat daerah dapat menetapkan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta langkah operasional yang lebih terukur dan selaras dengan kebutuhan masyarakat sehingga keberhasilan pencapaian program pembangunan daerah dapat diwujudkan secara efektif dan berkesinambungan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran  
Renstra DKUMKMP 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELIN E 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.17.3.31.3.29.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN											
- Meningkatkan produktifitas perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah sektor koperasi, usaha mikro dan industri pengolahan		Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,2	0,2	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	
			Persentase Usaha Mikro Naik Kelas (%)	4,43	4,55	4,64	4,71	4,76	4,8	4,82	
			Realisasi Pertumbuhan Produktivitas Industri Pengolahan (%)	3,02	3,05	3,07	3,1	3,12	3,14	3,15	
		Meningkatnya Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi berkualitas (%)	64,06	64,34	64,62	64,89	65,15	65,41	65,67	
		Meningkatnya Omset Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro (%)	3,68	3,7	3,72	3,76	3,8	3,85	3,92	
		Meningkatnya Nilai Produksi Industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi Industri Pengolahan (%)	5,48	5,5	5,52	5,54	5,56	5,58	5,6	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	63,3	68,7	69,4	70,8	71,5	72,9	73,6	

Berdasarkan tujuan dinas di atas, indikatornya terdiri dari :

1. Rasio volume usaha koperasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kota Balikpapan tahun 2024 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan sebesar 153,5 triliun rupiah yaitu sebesar 0,20% (299,5 miliar rupiah) yang selanjutnya diharapkan meningkat sesuai target pertahun (2025 s.d 2030) sebesar 0,01%. Definisi indikator tujuan terhadap rasio volume usaha koperasi ini merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah, Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.
2. Persentase usaha mikro naik kelas pada tahun 2024 sebesar 4,43% (330 usaha mikro), sebelumnya berjumlah 316 usaha mikro sehingga terdapat penambahan 14 usaha mikro naik kelas berdasarkan hasil kurasi dan pendampingan UMKM oleh Tim Pengembang Kewirausahaan dan UMKM DKUMKMP Kota Balikpapan. diharapkan meningkat sesuai target pertahun (2025 s.d 2030) sebesar 0,12%, Definisi indikator tujuan terhadap Persentase usaha mikro naik kelas dikondisikan dengan usaha mikro yang memenuhi salah satu indikator peningkatan omset usaha, akses pembiayaan, perluasan pasar, peningkatan kualitas produk, serta peningkatan kapasitas dan keterampilan pelaku usaha mikro.
3. Realisasi pertumbuhan produktivitas industri pengolahan pada tahun 2024 sebesar 3,02% yaitu capaian tahun 2024 sebesar 136,41% berbanding capaian tahun 2023 sebesar 132,41%, yang merupakan pembagian dari nilai produksi berbanding nilai bahan baku per tahun. diharapkan meningkat sesuai target pertahun (2025 s.d 2030) sebesar 0,02%, Definisi indikator tujuan terhadap Realisasi pertumbuhan produktivitas industri pengolahan merupakan pembagian nilai produksi dibagi dengan nilai bahan baku. (Sumber data: SIINas).

Sesuai dengan tujuan dinas tersebut, kami mengambil ini dari isi materi pokok salah satu tujuan Kota Balikpapan yaitu **perekonomian daerah yang tumbuh berkeadilan dan menyejahterakan**. Oleh karena itu, kami mengikuti arah tujuan kota menjadi tujuan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD yaitu **meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah sektor koperasi, usaha mikro dan industri pengolahan**. NSPK menjadi acuan dalam menentukan sasaran RPJMD agar pembangunan daerah selaras dengan kebijakan pemerintah pusat yang terdapat didalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 disebutkan bahwa :



1. **RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disusun berdasarkan RPJP Nasional.**
2. **RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.**

Pencapaian pembangunan ekonomi selama beberapa tahun terakhir turut didukung dengan berbagai capaian positif, di antaranya (1) peningkatan pola konsumsi pangan rumah tangga, (2) peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, (3) penyediaan lapangan kerja per tahun, **(4) peningkatan kontribusi koperasi terhadap perekonomian,** **(5) pengembangan kawasan industri** dan kawasan ekonomi khusus, (6) nilai ekspor produk industri pengolahan dan realisasi investasi luar Jawa, serta (7) peningkatan penerimaan pajak.

Pertumbuhan ekonomi Wilayah Kalimantan pada tahun 2029 ditargetkan tumbuh sebesar 8,2 persen. Pembangunan Wilayah Kalimantan difokuskan pada pengembangan, peningkatan produktivitas ekonomi, serta pemerataan ekonomi Kawasan Timur Indonesia melalui pengembangan Superhub Ekonomi Nusantara dan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Upaya tersebut juga didorong melalui pengembangan hilirisasi industri berbasis mineral dan sumber daya alam, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan aglomerasi IKN, dan pengembangan kawasan swasembada pangan, air, energi, dan kawasan komoditas unggulan.

Dengan demikian, dalam mewujudkan perekonomian yang tangguh, kebijakan yang perlu menjadi fokus perhatian ke depan antara lain **(1) hilirisasi industri pengolahan yang mendorong investasi dan ekspor;** (2) kinerja logistik; (3) penguatan pariwisata; **(4) kewirausahaan dan usaha mikro, kecil, dan menengah;** serta 5) swasembada pangan dan energi. Oleh karena itu, NSPK dan sasaran RPJMD Kota Balikpapan pada OPD kami adalah **meningkatnya produktivitas perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan.**

Dari tujuan dinas di atas, maka sasaran dinas kami adalah:

1. Meningkatkan koperasi berkualitas, dengan indikator persentase koperasi berkualitas, yaitu koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), memiliki volume usaha dan aset pada tahun 2024 sebesar 64,06% (82 koperasi berkualitas dari 128 koperasi aktif) dan diharapkan meningkat sebesar 65,67% (88 koperasi berkualitas dari 134 koperasi aktif) di akhir tahun Renstra. Definisi sasaran didapat dari perhitungan indikator meningkatnya koperasi berkualitas yang diukur dengan jumlah seluruh koperasi yang masih aktif (telah melaksanakan RAT dan menambah jumlah volume usaha serta asset) pada tahun n, selanjutnya dibagi dengan jumlah seluruh koperasi aktif yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

2. Meningkatnya omset usaha mikro, dengan indikator persentase pertumbuhan omset usaha mikro, yaitu omset usaha mikro pada tahun 2024 sebesar Rp. 2.125.596.748.942,- dan diharapkan meningkat di akhir tahun Renstra sebesar Rp. 2.657.388.781.042,- (3,92%). Definisi sasaran terhadap meningkatnya omset usaha mikro didapat dari perhitungan indikator jumlah total pendapatan yang diperoleh suatu usaha mikro dari hasil penjualan barang atau jasa dalam periode tertentu sebelum dikurangi biaya dan pengeluaran.
3. Meningkatnya nilai produksi industri pengolahan, dengan indikator persentase pertumbuhan nilai produksi industri pengolahan, yaitu pertumbuhan nilai produksi industri pengolahan pada tahun 2024 sebesar Rp. 13,587,628,405,247,- dan diharapkan meningkat di akhir tahun Renstra sebesar Rp. 18,788,536,408,120,- (5.6%). Definisi sasaran terhadap meningkatnya nilai produksi industri pengolahan didapat dari perhitungan indikator jumlah keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh industri pengolahan dalam periode tertentu yang sumber datanya berasal dari Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
4. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator yaitu nilai AKIP Perangkat Daerah, pada tahun 2024 nilai AKIP Perangkat Daerah sebesar 63,30 dan diharapkan di akhir tahun Renstra meningkat dengan nilai sebesar 73,60. Definisi sasaran terhadap meningkatnya kualitas AKIP diukur dengan angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja instansi tersebut dalam periode satu tahun.

### **3.3 Strategi DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang dimaksud dengan strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program prioritas pembangunan daerah atau perangkat daerah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Adapun strategi DKUMKMP untuk lima tahun ke depan disusun sebagai pedoman dalam mewujudkan sasaran tersebut secara efektif dan berkelanjutan sebagai berikut :

#### **Isu Strategis**

1. Lemahnya Pendukung Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) Secara Terintegrasi dan Berkelanjutan
2. Belum Optimalnya Infrastruktur, Informasi, Standarisasi dan sinergi dalam Penguatan Industri

### **Strategi Pelaksanaan**

1. Pengolahan dan pelaporan data Koperasi dan Usaha Mikro (KUM), Kualitas kelembagaan koperasi, Administrasi dan manajemen koperasi, Sertifikasi pengurus/pengawas/pengelola koperasi, Kemitraan pelaku usaha mikro, pendampingan dan sertifikasi pengurusan perizinan berusaha, Data usaha mikro, Pelaku usaha mikro yang terfasilitasi, Kerjasama Usaha Mikro dengan pengembang Usaha Mikro, Daya saing produk Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) dan pemasaran produk Usaha Mikro
2. Pengelolaan data industri, Pembangunan dan pengembangan SIKS dan SIKT, Kepemilikan sertifikasi halal, HKI (paten, hak cipta, merk), GMP/CPPOB, SNI

Dengan demikian, fokus utama strategi adalah memperkuat kelembagaan, meningkatkan daya saing, serta memastikan keberlanjutan usaha mikro dan industri melalui integrasi data, sertifikasi, dan standardisasi.

Penahapan Rencana Strategis (Renstra) merujuk pada proses implementasi program dan kegiatan selama periode lima tahun agar tujuan dan sasaran DKUMKMP dapat dicapai secara terukur, terarah, dan berkelanjutan. Penahapan ini dibagi ke dalam lima tahun dengan pola pelaksanaan bertahap (phasing), sehingga setiap tahap dapat saling mendukung untuk mencapai target akhir yang telah ditetapkan, yaitu pada tabel berikut :



Tabel 3.4 Penahapan Renstra DKUMKMP

No	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	1. Peningkatan kapasitas SDM aparaturngawas koperasi 2. Pendampingan koperasi 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi 4. Peningkatan kompetensi SDM koperasi 5. Pendampingan pengembangan Usaha Koperasi	1. Peningkatan kapasitas SDM aparaturngawas koperasi 2. Pendampingan koperasi 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi 4. Peningkatan kompetensi SDM koperasi 5. Pendampingan pengembangan Usaha Koperasi	1. Peningkatan kapasitas SDM aparaturngawas koperasi 2. Pendampingan koperasi 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi 4. Peningkatan kompetensi SDM koperasi 5. Pendampingan pengembangan Usaha Koperasi	1. Peningkatan kapasitas SDM aparaturngawas koperasi 2. Pendampingan koperasi 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi 4. Peningkatan kompetensi SDM koperasi 5. Pendampingan pengembangan Usaha Koperasi	1. Peningkatan kapasitas SDM aparaturngawas koperasi 2. Pendampingan koperasi 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi 4. Peningkatan kompetensi SDM koperasi 5. Pendampingan pengembangan Usaha Koperasi
2	1. Pendampingan kepada pelaku usaha mikro untuk menjadi wirausaha mandiri 2. Pengembangan kewirausahaan 3. Pemberdayaan UMKM	1. Pendampingan kepada pelaku usaha mikro untuk menjadi wirausaha mandiri 2. Pengembangan kewirausahaan 3. Pemberdayaan UMKM	1. Pendampingan kepada pelaku usaha mikro untuk menjadi wirausaha mandiri 2. Pengembangan kewirausahaan 3. Pemberdayaan UMKM	1. Pendampingan kepada pelaku usaha mikro untuk menjadi wirausaha mandiri 2. Pengembangan kewirausahaan 3. Pemberdayaan UMKM	1. Pendampingan kepada pelaku usaha mikro untuk menjadi wirausaha mandiri 2. Pengembangan kewirausahaan 3. Pemberdayaan UMKM
3	1. Perencanaan pembangunan Sentra Industri Kecil (SIK) 2. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Sentra Industri Kecil (SIK)	1. Perencanaan pembangunan SIK dan non SIK 2. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana SIK	1. Perencanaan pembangunan SIK dan non SIK 2. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana SIK dan non SIK	1. Perencanaan pembangunan SIK dan non SIK 2. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana SIK dan non SIK	1. Perencanaan pembangunan SIK dan non SIK 2. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana SIK dan non SIK



Dari lima tahapan 2026 hingga 2030, program ini berfokus pada peningkatan kapasitas SDM dan kompetensi pengawas serta pengelola koperasi, pendampingan dan pengembangan usaha koperasi, pemberdayaan UMKM, serta perencanaan dan pemeliharaan sentra industri kecil (SIK) maupun non-SIK. dimana bagi koperasi, UMKM, dan IKM untuk meningkatkan profesionalisme dan kapasitas pengelolaan usaha, mendorong kemandirian wirausaha mikro, memperkuat kelembagaan koperasi, serta menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan industri lokal secara berkelanjutan.

Penyajian lokus Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dapat disusun berdasarkan kecamatan dan/atau wilayah pengembangan sesuai dengan kebutuhan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, strategi merupakan langkah-langkah yang memuat program prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, sedangkan sasaran adalah kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan. Strategi DKUMKMP untuk lima tahun mendatang difokuskan pada penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan daya saing UMKM, serta pengembangan infrastruktur industri secara terintegrasi dan berkelanjutan. Isu strategis yang menjadi perhatian meliputi lemahnya dukungan pemberdayaan KUM secara terpadu serta belum optimalnya infrastruktur, informasi, standardisasi, dan sinergi penguatan industri.

Strategi pelaksanaan diarahkan untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan kapasitas SDM, serta mendukung daya saing produk koperasi, UMKM, dan IKM melalui integrasi data, sertifikasi, serta penguatan sarana dan prasarana industri. Penahapan implementasi dilakukan secara bertahap selama lima tahun, meliputi peningkatan kapasitas aparatur dan koperasi, pendampingan usaha, pemberdayaan UMKM, pengembangan kewirausahaan, serta pembangunan dan pemeliharaan Sentra Industri Kecil (SIK) dan non-SIK. Sinergi antara arah kebijakan RPJMD dan Renstra DKUMKMP ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas perekonomian daerah yang berkelanjutan, memperkuat daya saing industri, serta menekan angka pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan sektor ekonomi berbasis lokal.

### **3.4 Arah Kebijakan DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

Arah Kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi sebagai berikut :

Tabel 3.5 Arah Kebijakan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
1	1. Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan 2. Menurunnya pengangguran	1. Pengembangan Kawasan Industri yang berwawasan lingkungan. 2. Pengembangan IKM dan UMKM yang berdayasaing serta penumbuhan minat wirausaha baru.	1. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 2. Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan UMKM 3. Penguatan Infrastruktur, Sistem Informasi serta Sinergi Pengawasan dan Pembinaan Industri

keterkaitan antara Operationalisasi NSPK, Arah Kebijakan RPJMD, dan Arah Kebijakan Renstra DKUMKMP untuk mencapai Visi Misi RPJMD Kota Balikpapan. dimana Peningkatan produktivitas perekonomian daerah yang berkelanjutan dan penurunan pengangguran merupakan sasaran utama yang ingin dicapai. Untuk merealisasikan hal tersebut, arah kebijakan RPJMD fokus pada pengembangan kawasan industri berwawasan lingkungan serta pengembangan IKM dan UMKM yang berdaya saing, yang juga sejalan dengan penguatan infrastruktur dan sinergi pengawasan industri.

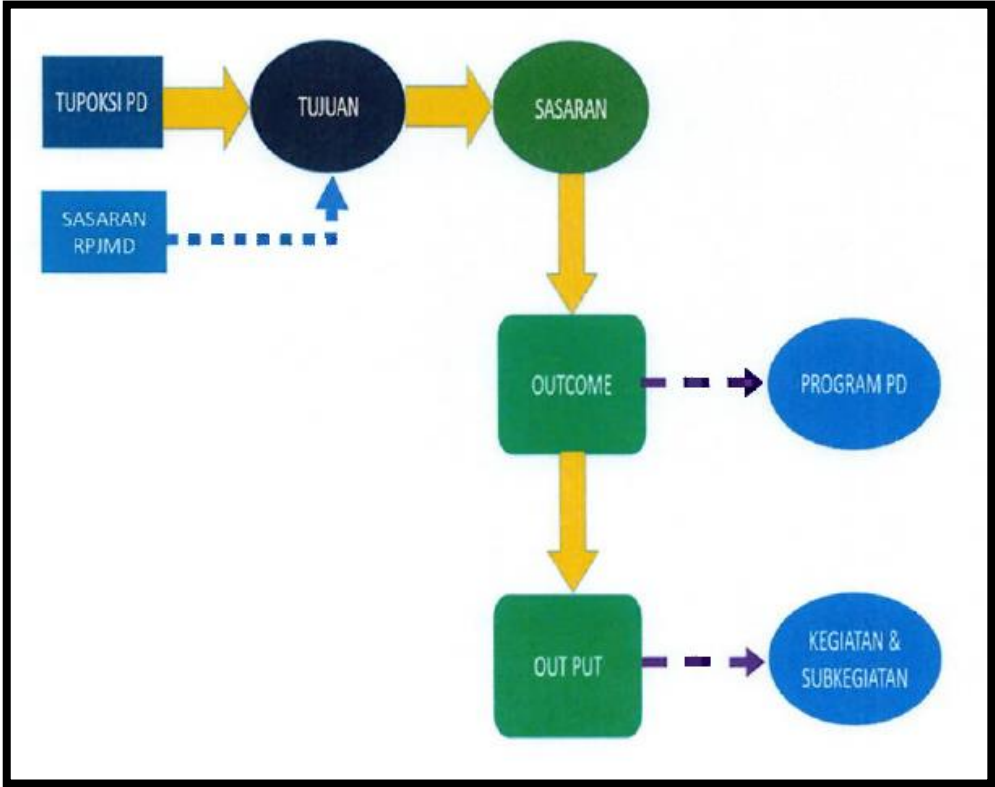
Arah kebijakan Renstra DKUMKMP secara spesifik menguraikan langkah-langkah yang lebih detail, yaitu peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, pengembangan kapasitas dan pemberdayaan UMKM, serta penguatan infrastruktur, sistem informasi, dan sinergi pengawasan. Di sinilah peran DKUMKMP menjadi sangat penting. DKUMKMP memiliki tugas dan fungsi utama untuk memfasilitasi dan membina koperasi, UMKM serta industri, memastikan tumbuh menjadi entitas ekonomi yang kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dengan demikian, tugas-tugas seperti penyuluhan, pelatihan manajemen, fasilitasi permodalan, dan pendampingan bisnis menjadi kunci untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Sinergi antara Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (DKUMKMP) dengan arah kebijakan yang tercantum dalam tabel akan mempercepat pencapaian tujuan. Dengan meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi melalui pembinaan yang efektif, DKUMKMP membantu memastikan koperasi beroperasi secara profesional dan akuntabel. Melalui pengembangan kapasitas dan pemberdayaan UMKM, DKUMKMP dapat menyediakan pelatihan dan bimbingan yang relevan, sehingga UMKM mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Secara spesifik, pembinaan terhadap industri kecil menengah (IKM) menjadi krusial. DKUMKMP dapat memfasilitasi IKM untuk mengadopsi teknologi yang lebih modern, meningkatkan standar kualitas produk, serta memperluas jangkauan pasar, baik melalui platform digital maupun kemitraan dengan industri besar. Dukungan terhadap IKM ini tidak hanya akan memperkuat struktur ekonomi lokal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, yang secara langsung akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas perekonomian daerah dan penurunan tingkat pengangguran, selaras dengan tujuan utama



**BAB IV**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB**  
**KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGARAAN**  
**BIDANG URUSAN**

Program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Perindustrian (DKUMKMP) Kota Balikpapan merupakan program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan. Semua inisiatif ini dirancang agar sejalan dengan tugas pokok dan fungsi DKUMKMP.



**Gambar 4.1**  
**Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra DKUMKMP**

Rencana program, beserta indikator keluaran dan alokasi anggaran yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD, kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan yang spesifik untuk setiap program prioritas. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah DKUMKMP Kota Balikpapan.

CASCADING DKUMKMP Kota Balikpapan periode 2025–2029 merupakan proses penurunan atau penjabaran tujuan dan sasaran strategis dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah untuk memastikan setiap unit kerja, program, kegiatan, hingga individu memiliki kontribusi yang jelas dan terukur terhadap pencapaian visi dan misi daerah. Proses ini dimulai dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota yang tertuang dalam RPJMD, kemudian dijabarkan menjadi tujuan, sasaran strategis daerah, dan program prioritas yang masing-masing memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan. Selanjutnya, IKU dipecah lagi menjadi Indikator Kinerja Individu yang menjadi tanggung jawab setiap pejabat atau pegawai. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan DKUMKMP, mulai dari pendampingan UMKM, pembinaan koperasi, hingga pengembangan kawasan industri, secara langsung mendukung pencapaian target RPJMD. Proses cascading ini memastikan keselarasan dan akuntabilitas kinerja dari level tertinggi hingga level terendah dalam organisasi sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.



TABEL 4.1 CASCADING DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025-2029

TUJUAN KOTA	Perekonomian daerah yang tumbuh berkeadilan dan menyejahterakan								
INDIKATOR	Laju Pertumbuhan Ekonomi								
SASARAN KOTA	Meningkatnya Produktifitas Perekonomian Daerah yang merata dan berkelanjutan								
INDIKATOR	PDRB Per Kapita; Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa								
TUJUAN DKUMKMP	Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah sektor koperasi, usaha mikro dan industri pengolahan								
INDIKATOR	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB		Persentase usaha mikro naik kelas		Realisasi Pertumbuhan Produktivitas Industri Pengolahan (%)				
PERHITUNGAN	( Volume usaha koperasi daerah / PDRB ADHB ) x 100%		( Jumlah usaha mikro naik kelas tahun N dikurang usaha mikro naik kelas tahun (N-1) ) dibagi dengan jumlah usaha mikro naik kelas tahun N-1 dikali 100		(Realisasi produktivitas industri pengolahan tahun N dikurang Realisasi produktivitas industri pengolahan tahun N-1 ) dibagi realisasi produktivitas industri pengolahan tahun N-1 dikali 100				
SASARAN DKUMKMP	Meningkatnya Koperasi Berkualitas		Meningkatnya omset usaha mikro		Meningkatnya Nilai Produksi Industri Pengolahan				
INDIKATOR	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)		Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro (%)		Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi Industri Pengolahan (%)				
PERHITUNGAN	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset dibagi Jumlah seluruh Koperasi aktif dikali 100 persen		( Jumlah omset usaha mikro tahun N dikurang Jumlah omset usaha mikro tahun (N-1) ) dibagi dengan jumlah omset usaha mikro tahun N-1 dikali 100		(Realisasi nilai produksi industri pengolahan tahun N dikurang dengan nilai produksi industri tahun N-1) dibagi dengan nilai produksi industri tahun N-1 dikali 100				
PROGRAM	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLUNDUNGAN KOPERASI	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
OUTCOME	Meningkatnya koperasi sehat	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Meningkatnya kapasitas UMKM yang Mandiri	Meningkatnya daya saing UMKM	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Meningkatnya Ketersediaan Informasi Industri secara Lengkap, Akurat dan Terkini	Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan
INDIKATOR	Persentase koperasi sehat	Persentase SDM Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya	Persentase Koperasi Aktif	Pertumbuhan Usaha Mikro Formal	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Kepatuhan Industri	Persentase Kepatuhan Pelaporan SIINas	Persentase Industri yang Memanfaatkan EBT
PERHITUNGAN	Jumlah Koperasi Sehat dibagi Jumlah Koperasi Aktif dikali 100	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat pemahamannya melalui pelatihan, bimbingan teknis, atau pengembangan kapasitas dibagi jumlah SDM Koperasi aktif dikali 100	Jumlah Koperasi aktif dibagi jumlah total koperasi terdaftar dikali 100 persen	Jumlah Usaha Mikro formal Tahun N dikurang Jumlah Usaha Mikro formal Tahun N-1 DIBAGI Jumlah usaha mikro formal Tahun N-1 dikali 100	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi dibagi Jumlah Usaha Mikro Binaan dikali 100	Jumlah IKM tahun n dibagi Jumlah IKM tahun n-1 dikali 100	Jumlah izin usaha yang diawasi dibagi jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Industri (IPIUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait dikali 100	total IKM yang melapor di SIINas dibagi dengan IKM yang terdaftar di SIINas dikali 100	Jumlah Industri yang memanfaatkan EBT dibagi dengan jumlah seluruh industri dikali 100
KEGIATAN	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
OUTPUT	Terlaksannya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Terlaksannya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro	Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Terfasilitasinya legalitas usaha IKM	Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri	Terlaksananya pengawasan EBT



#### **4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan RENSTRA DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

Renstra DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 disusun sebagai upaya strategis untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah secara terencana dan berkesinambungan. Rangkaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dirumuskan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan RENSTRA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
2.17.3.31.0.00.01.0001 - UPTD Sentra Industri Kecil Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian						
- Meningkatnya produktifitas perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah sektor koperasi, usaha mikro dan industri pengolahan	Meningkatnya Nilai Produksi Industri Pengolahan	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah		Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (%)	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
				Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
2.17.3.31.3.29.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN						
- Meningkatnya produktifitas perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah sektor koperasi, usaha mikro dan industri pengolahan				Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	
					Persentase Usaha Mikro Naik Kelas (%)	
					Realisasi Pertumbuhan Produktivitas Industri Pengolahan (%)	
		Meningkatnya Koperasi Berkualitas	Meningkatnya koperasi sehat	Terlaksannya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Koperasi yang berkualitas (%)	
					Persentase Koperasi Sehat (%)	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
					Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
					Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	2.17.03.2.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
					Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian		Persentase SDM Koperasi yang Meningkat Kualitasnya (%)	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
				Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi		Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperas	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya Omset Usaha Mikro	Meningkatnya kapasitas UMKM yang mandiri		Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro (%)	
					Pertumbuhan Usaha Mikro Formal (%)	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
				Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
					Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
			Meningkatnya daya saing UMKM		Persentase jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi (%)	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
				Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
		Meningkatnya Nilai Produksi Industri Pengolahan			Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi Industri Pengolahan (%)	
			Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan		Persentase Industri yang Memanfaatkan EBT (%)	3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
				Terlaksananya pengawasan EBT	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	3.29.05.2.01 - Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	3.29.05.2.01.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah		Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (%)	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
				Tertindakannya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
					- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
					Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
					- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian		Persentase Kepatuhan Industri (%)	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
				Terfasilitasinya legalitas usaha IKM	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IUPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
			Meningkatnya ketersediaan informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini		Persentase Kepatuhan Pelaporan SIINas (%)	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
				Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IUPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	3.31.04.2.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
					Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	3.31.04.2.01.0002 - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terwujudnya profesionalisme aparatur perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.17.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.17.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terwujudnya layanan umum perkantoran perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.17.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.17.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Terwujudnya operasional umum perangkat daerah.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.17.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar berfungsi optimal.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator keluaran dari program-program prioritas ini ditetapkan sebagai indikator kinerja yang mencerminkan *outcome* atau hasil jangka menengah. *Outcome* ini menunjukkan manfaat yang diperoleh dan berfungsi sebagai cerminan keberhasilan dari serangkaian kegiatan dalam satu program. Setiap kegiatan yang dipilih merupakan wujud akuntabilitas kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DKUMKMP Kota Balikpapan. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal, DKUMKMP menetapkan program dan kegiatan berdasarkan prioritas yang relevan dengan isu-isu strategis dan disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya. Berikut perencanaan program DKUMKMP yang masuk dalam sasaran tujuan tahun 2025-2029:

1. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menghasilkan *outcome* meningkatnya kualitas layanan internal perangkat daerah, yang merupakan salah satu sasaran tujuan meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sasaran kegiatan

- a. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel
- b. Terwujudnya profesionalisme aparatur perangkat daerah
- c. Terwujudnya layanan umum perkantoran perangkat daerah
- d. Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- e. Terwujudnya operasional umum perangkat daerah.
- f. Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar berfungsi optimal.

yang menghasilkan :

- a. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- c. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
- d. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
- e. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
- f. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- g. Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
- h. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- i. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
- j. Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
- k. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
- l. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
- m. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
- n. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
- o. Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
- p. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- q. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
- r. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
- s. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

- t. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
- u. Jumlah Mebel yang Dipelihara
- v. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
- w. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Dengan indikator outcome Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 82.45 pada awal Renstra dan meningkat menjadi 88.00 pada akhir periode Renstra. Definisi program terhadap meningkatnya kualitas layanan internal diukur melalui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau penyedia layanan publik. IKM digunakan untuk menilai sejauh mana kualitas layanan dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.

2. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi menghasilkan *outcome* meningkatnya koperasi sehat yang merupakan salah satu sasaran tujuan meningkatnya koperasi yang berkualitas, dengan sasaran kegiatan terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang menghasilkan :

- a. jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan.
- b. jumlah koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi

dengan indikator outcome berupa persentase koperasi sehat sebesar 4.69% pada awal Renstra dan meningkat menjadi 11.11% pada akhir periode Renstra. Definisi program terhadap meningkatnya koperasi sehat diukur melalui jumlah koperasi yang dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, memiliki manajemen yang sehat serta karakteristik seperti tata kelola yang baik, profil usaha yang terkelola, dan kinerja keuangan yang baik dan transparan, berdasarkan Permenkop UKM No. 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi.

3. Program pendidikan dan latihan perkoperasian menghasilkan *outcome* meningkatnya kualitas SDM perkoperasian yang merupakan salah satu sasaran tujuan meningkatnya koperasi yang berkualitas, dengan sasaran kegiatan Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian yang menghasilkan jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian dengan indikator *outcome* berupa persentase SDM koperasi yang meningkat kualitasnya sebesar 6.25% pada awal Renstra dan 7.16% pada akhir periode Renstra. Definisi program terhadap meningkatnya kualitas SDM perkoperasian diukur melalui jumlah dan proporsi SDM koperasi yang menerima pelatihan, bimbingan teknis, atau pendampingan guna meningkatkan kapasitas dan kompetensinya dalam mengelola koperasi.

4. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi menghasilkan *outcome* meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi, yang merupakan salah satu sasaran tujuan meningkatnya koperasi yang berkualitas, dengan sasaran kegiatan Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang menghasilkan jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha dengan indikator *outcome* berupa persentase koperasi aktif sebesar 23.44% pada awal Renstra dan 27.21% pada akhir periode Renstra. Definisi program terhadap meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi diukur melalui jumlah koperasi aktif

yang secara rutin melaksanakan kegiatan usaha sesuai bidangnya, dengan laporan keuangan yang tertib dan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi anggotanya.

5. Program pemberdayaan UMKM menghasilkan *outcome* meningkatnya kapasitas UMKM yang mandiri, yang merupakan salah satu sasaran tujuan meningkatnya omset usaha mikro dengan sasaran kegiatan terlaksananya pemberdayaan usaha mikro dengan menghasilkan:
  - a. Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro.
  - b. Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro.
  - c. Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro.
  - d. Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan.

Dengan indikator *outcome* pertumbuhan usaha mikro formal sebesar 1.25% pada awal Renstra dan 2.13% pada akhir periode Renstra. Definisi program terhadap meningkatnya kapasitas UMKM mandiri diukur dari jumlah pelaku usaha mikro formal yang memiliki legalitas usaha, akses permodalan, dan kemampuan produksi yang meningkat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

6. Program pengembangan UMKM menghasilkan *outcome* meningkatnya daya saing UMKM, yang merupakan salah satu sasaran tujuan meningkatnya omset usaha mikro dengan sasaran kegiatan terlaksananya pengembangan usaha mikro dengan menghasilkan jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi dengan indikator *outcome* persentase usaha mikro yang difasilitasi sebesar 11.14% pada awal Renstra dan 12.72% pada akhir periode Renstra. Definisi program terhadap meningkatnya daya saing UMKM diukur dari jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas dan kompetensi, termasuk dalam pengembangan produk, desain, dan pemasaran.
7. Program perencanaan dan pembangunan industri menghasilkan *outcome* meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah, yang merupakan salah satu sasaran tujuan meningkatnya nilai produksi industri pengolahan dengan sasaran kegiatan Terlaksananya penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri dengan menghasilkan:
  - a. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri.
  - b. Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.
  - c. Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan.
  - d. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
  - e. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.
  - f. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.



Dengan indikator *outcome* persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah sebesar 0.97% pada awal Renstra dan 1.96% pada akhir periode Renstra. Definisi program terhadap meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah diukur dari peningkatan jumlah unit usaha industri yang memenuhi ketentuan dan melakukan investasi dalam kegiatan produksi, tenaga kerja, serta penyerapan bahan baku lokal.

8. Program pengendalian dan usaha industri menghasilkan *outcome* meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian, yang merupakan salah satu sasaran tujuan meningkatnya nilai produksi industri pengolahan dengan sasaran kegiatan Terasfasilitasinya legalitas usaha IKM dengan menghasilkan Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan indikator *outcome* persentase kepatuhan industri sebesar 0.87% pada awal Renstra dan 5.24% pada akhir periode Renstra. Definisi program terhadap meningkatnya kualitas tertib berusaha sektor industri diukur dari kepatuhan pelaku industri terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku melalui hasil pemantauan dan pengawasan dinas teknis.
9. Program pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional menghasilkan *outcome* meningkatnya ketersediaan informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini, yang merupakan salah satu sasaran tujuan meningkatnya nilai produksi industri pengolahan dengan sasaran kegiatan Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri dengan menghasilkan:
  - a. Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas
  - b. Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
  - c. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Dengan indikator *outcome* persentase kepatuhan pelaporan SIINas sebesar 30.57% pada awal Renstra dan meningkat menjadi 36.00% pada akhir periode Renstra. Definisi program terhadap meningkatnya ketersediaan informasi industri diukur dari jumlah pelaku industri yang melaporkan data dan informasi secara berkala melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) guna mendukung pengambilan kebijakan pembangunan industri.

10. Program pengelolaan energi baru terbarukan menghasilkan *outcome* meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan, yang merupakan salah satu sasaran tujuan meningkatnya nilai produksi industri pengolahan dengan sasaran kegiatan terlaksananya pengawasan EBT dengan menghasilkan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator *outcome* persentase industri yang memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT) sebesar N/A pada awal Renstra dan 1.05% pada akhir periode Renstra. Definisi program terhadap meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan diukur melalui jumlah perusahaan yang memanfaatkan

energi alternatif seperti biomassa, surya, dan tenaga angin untuk mendukung efisiensi energi serta kelestarian lingkungan

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan DKUMKMP Kota Balikpapan serta masing-masing indikator kinerja dan pendanaan indikatif disajikan dalam Tabel di bawah ini :



Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				20.699.317.536		23.462.248.000		24.623.948.436		24.969.244.000		25.718.167.000		
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.137.117.536		11.791.706.803		12.525.168.592		12.689.128.071		13.389.147.593		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	82,45	84	11.137.117.536	85	11.791.706.803	86	12.525.168.592	87	12.689.128.071	88	13.389.147.593	2.17.3.31.3.29.01 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIA N	
2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.317.385.803		7.317.385.803		7.317.385.803		7.317.385.803		7.317.385.803		
Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27	38	7.317.385.803	53	7.317.385.803	53	7.317.385.803	53	7.317.385.803	53	7.317.385.803		
2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.317.385.803		7.317.385.803		7.317.385.803		7.317.385.803		7.317.385.803		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27	38	7.317.385.803	53	7.317.385.803	53	7.317.385.803	53	7.317.385.803	53	7.317.385.803		
2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				275.000.000		299.279.890		369.279.890		390.000.000		390.000.000		

RENSTRA DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2025–2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya profesionalisme aparatur perangkat daerahl	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	20	37	275.000.000	53	299.279.890	53	369.279.890	53	390.000.000	53	390.000.000		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	47	0		0		53		53		53			
2.17.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		70.000.000		70.000.000		70.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	47	0	0	0	0	53	70.000.000	53	70.000.000	53	70.000.000		
2.17.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				275.000.000		299.279.890		299.279.890		320.000.000		320.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	20	37	275.000.000	53	299.279.890	53	299.279.890	53	320.000.000	53	320.000.000		
2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				857.015.833		1.214.220.135		1.424.220.135		1.464.220.135		1.488.123.410		
Terwujudnya layanan umum perkantoran perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	857.015.833	3	1.214.220.135	3	1.424.220.135	3	1.464.220.135	3	1.488.123.410		

RENSTRA DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2025–2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0		5.000		5.000		5.000		5.000			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			



RENSTRA DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2025–2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.999.925		11.999.925		11.999.925		11.999.925		11.999.925		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	11.999.925	1	11.999.925	1	11.999.925	1	11.999.925	1	11.999.925		
2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				111.087.610		181.804.210		181.804.210		181.804.210		181.804.210		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	111.087.610	4	181.804.210	4	181.804.210	4	181.804.210	4	181.804.210		
2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				256.716.815		269.541.000		269.541.000		269.541.000		269.541.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	256.716.815	5	269.541.000	5	269.541.000	5	269.541.000	5	269.541.000		
2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				82.125.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		113.903.275		

RENSTRA DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2025–2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	82.125.000	3	90.000.000	3	90.000.000	3	90.000.000	3	113.903.275		
2.17.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				55.873.000		55.875.000		55.875.000		55.875.000		55.875.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4	55.873.000	4	55.875.000	4	55.875.000	4	55.875.000	4	55.875.000		
2.17.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				0		0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	0	0	1	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.17.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				100.083.250		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	100.083.250	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000		
2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				239.130.233		485.000.000		485.000.000		525.000.000		525.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	239.130.233	12	485.000.000	12	485.000.000	12	525.000.000	12	525.000.000		
2.17.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		200.000.000		200.000.000		200.000.000		

RENSTRA DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2025–2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	0	5.000	0	5.000	200.000.000	5.000	200.000.000	5.000	200.000.000		
2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				302.100.000		321.300.000		651.300.000		651.300.000		651.300.000		
Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	0	302.100.000	10	321.300.000	10	651.300.000	10	651.300.000	10	651.300.000		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	0		10		10		10		10			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2	2		4		4		4		4			
2.17.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				302.100.000		321.300.000		321.300.000		321.300.000		321.300.000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2	2	302.100.000	4	321.300.000	4	321.300.000	4	321.300.000	4	321.300.000		
2.17.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		0		110.000.000		110.000.000		110.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	0	0	10	0	10	110.000.000	10	110.000.000	10	110.000.000		



RENSTRA DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2025–2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		220.000.000		220.000.000		220.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	0	0	10	0	10	220.000.000	10	220.000.000	10	220.000.000		
2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.231.027.700		1.264.523.600		1.363.945.314		1.284.360.154		1.594.300.930		
Terwujudnya operasional umum perangkat daerah.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1.231.027.700	1	1.264.523.600	1	1.363.945.314	1	1.284.360.154	1	1.594.300.930		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.17.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000		
2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		440.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	440.000.000		

RENSTRA DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2025–2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				925.027.700		958.523.600		1.057.945.314		978.360.154		1.148.300.930		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	925.027.700	12	958.523.600	12	1.057.945.314	12	978.360.154	12	1.148.300.930		
2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.154.588.200		1.374.997.375		1.399.037.450		1.581.861.979		1.948.037.450		
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar berfungsi optimal.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	110	110	1.154.588.200	110	1.374.997.375	110	1.399.037.450	110	1.581.861.979	110	1.948.037.450		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10	0		10		10		10		10			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20	20		21		21		21		21			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi (Unit)	2	2		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi (Unit)	1	1		3		3		3		3			

RENSTRA DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2025–2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		500.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20	20	350.000.000	21	350.000.000	21	350.000.000	21	350.000.000	21	500.000.000		
2.17.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		0		22.000.000		22.000.000		22.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10	0	0	10	0	10	22.000.000	10	22.000.000	10	22.000.000		
2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				254.088.200		274.997.375		277.037.450		277.037.450		277.037.450		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	110	110	254.088.200	110	274.997.375	110	277.037.450	110	277.037.450	110	277.037.450		
2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				420.500.000		620.000.000		620.000.000		802.824.529		907.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi (Unit)	2	2	420.500.000	1	620.000.000	1	620.000.000	1	802.824.529	1	907.000.000		
2.17.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		242.000.000		

RENSTRA DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2025–2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	130.000.000	3	130.000.000	3	130.000.000	3	130.000.000	3	242.000.000		
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				272.900.000		602.200.000		683.779.844		715.115.929		764.019.407		
Meningkatnya koperasi sehat	Persentase Koperasi Sehat (%)	4,69	6,17	272.900.000	7,41	602.200.000	8,64	683.779.844	9,88	715.115.929	11,11	764.019.407	2.17.3.31.3.29.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				272.900.000		602.200.000		683.779.844		715.115.929		764.019.407		
Terlaksannya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	30	33	272.900.000	35	602.200.000	37	683.779.844	40	715.115.929	42	764.019.407		
	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	100	0		100		100		100		100			
2.17.03.2.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				0		230.000.000		230.000.000		230.000.000		230.000.000		

RENSTRA DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2025–2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	100	0	0	100	230.000.000	100	230.000.000	100	230.000.000	100	230.000.000		
2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				272.900.000		372.200.000		453.779.844		485.115.929		534.019.407		
Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	30	33	272.900.000	35	372.200.000	37	453.779.844	40	485.115.929	42	534.019.407		
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				465.000.000		465.000.000		465.000.000		465.000.000		465.000.000		
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya (%)	6,25	6,17	465.000.000	6,42	465.000.000	6,67	465.000.000	6,91	465.000.000	7,16	465.000.000	2.17.3.31.3.29.01 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				465.000.000		465.000.000		465.000.000		465.000.000		465.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	80	90	465.000.000	105	465.000.000	105	465.000.000	105	465.000.000	105	465.000.000		

RENSTRA DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2025–2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				465.000.000		465.000.000		465.000.000		465.000.000		465.000.000		
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	80	90	465.000.000	105	465.000.000	105	465.000.000	105	465.000.000	105	465.000.000		
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				639.300.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	23,44	26,21	639.300.000	26,46	450.000.000	26,71	450.000.000	26,96	450.000.000	27,21	450.000.000	2.17.3.31.3.29.01 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIA N	
2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				639.300.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperas	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	60	70	639.300.000	60	450.000.000	60	450.000.000	60	450.000.000	60	450.000.000		

RENSTRA DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2025–2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				639.300.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		
Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	60	70	639.300.000	60	450.000.000	60	450.000.000	60	450.000.000	60	450.000.000		
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				2.275.000.000		3.205.000.000		3.400.000.000		3.400.000.000		3.400.000.000		
Meningkatnya kapasitas UMKM yang mandiri	Pertumbuhan Usaha Mikro Formal (%)	1,25	1,39	2.275.000.000	1,83	3.205.000.000	2,03	3.400.000.000	2,09	3.400.000.000	2,13	3.400.000.000	2.17.3.31.3.29.01 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIA N	
2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				2.275.000.000		3.205.000.000		3.400.000.000		3.400.000.000		3.400.000.000		

RENSTRA DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2025–2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	48	50	2.275.000.000	55	3.205.000.000	60	3.400.000.000	65	3.400.000.000	70	3.400.000.000		
	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	15	15		20		25		30		35			
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	120	100		105		110		115		120			
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	60	50		55		60		65		70			
2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro				200.000.000		275.000.000		325.000.000		325.000.000		325.000.000		
Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	60	50	200.000.000	55	275.000.000	60	325.000.000	65	325.000.000	70	325.000.000		
2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				475.000.000		550.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		



RENSTRA DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2025–2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	120	100	475.000.000	105	550.000.000	110	650.000.000	115	650.000.000	120	650.000.000		
2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				700.000.000		880.000.000		925.000.000		925.000.000		925.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	15	15	700.000.000	20	880.000.000	25	925.000.000	30	925.000.000	35	925.000.000		
2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKMd dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan				900.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKMd dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	48	50	900.000.000	55	1.500.000.000	60	1.500.000.000	65	1.500.000.000	70	1.500.000.000		
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				5.910.000.000		6.948.341.197		7.100.000.000		7.250.000.000		7.250.000.000		
Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi (%)	11,14	11,93	5.910.000.000	11,98	6.948.341.197	12,5	7.100.000.000	12,7	7.250.000.000	12,72	7.250.000.000	2.17.3.31.3.29.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	

RENSTRA DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2025–2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				5.910.000.000		6.948.341.197		7.100.000.000		7.250.000.000		7.250.000.000		
Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	100	80	5.910.000.000	85	6.948.341.197	90	7.100.000.000	95	7.250.000.000	100	7.250.000.000		
2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				5.910.000.000		6.948.341.197		7.100.000.000		7.250.000.000		7.250.000.000		
Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	100	80	5.910.000.000	85	6.948.341.197	90	7.100.000.000	95	7.250.000.000	100	7.250.000.000		
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Persentase Industri yang Memanfaatkan EBT (%)	0	0	0	0,26	100.000.000	0,52	100.000.000	0,79	100.000.000	1,05	100.000.000	2.17.3.31.3.29.01 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIA N	

RENSTRA DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2025–2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.29.05.2.01 - Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya pengawasan EBT	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	0	10	100.000.000	12	100.000.000	14	100.000.000	16	100.000.000		
3.29.05.2.01.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan  Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	0	10	100.000.000	12	100.000.000	14	100.000.000	16	100.000.000		
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				2.860.180.464		4.353.200.000		4.587.271.564		4.828.200.000		4.976.200.000		
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				2.692.042.424		3.908.200.000		4.142.271.564		4.383.200.000		4.531.200.000		
Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (%)	0,97	1,32	2.692.042.424	1,49	3.908.200.000	1,66	4.142.271.564	1,81	4.383.200.000	1,96	4.531.200.000	2.17.3.31.0.00.01 .0001 - UPTD Sentra Industri Kecil Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	

RENSTRA DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2025–2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				1.896.137.500		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		
Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	2	2	1.896.137.500	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000		
3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1.896.137.500		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	2	2	1.896.137.500	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000		
Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (%)	0,97	1,32	2.692.042.424	1,49	3.908.200.000	1,66	4.142.271.564	1,81	4.383.200.000	1,96	4.531.200.000	2.17.3.31.3.29.01 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIA N	

RENSTRA DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2025–2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				795.904.924		1.908.200.000		2.142.271.564		2.383.200.000		2.531.200.000		
Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	5	5	795.904.924	5	1.908.200.000	5	2.142.271.564	5	2.383.200.000	5	2.531.200.000		
	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	2	0		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	5	6		6		6		6		6			

RENSTRA DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2025–2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	0		1		1		0		0			
3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				214.477.000		552.000.000		552.000.000		552.000.000		650.000.000		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	5	5	214.477.000	5	552.000.000	5	552.000.000	5	552.000.000	5	650.000.000		
3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				581.427.924		700.000.000		759.071.564		1.000.000.000		1.000.000.000		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	5	6	581.427.924	6	700.000.000	6	759.071.564	6	1.000.000.000	6	1.000.000.000		
3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				0		656.200.000		656.200.000		656.200.000		656.200.000		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	2	0	0	3	656.200.000	3	656.200.000	3	656.200.000	3	656.200.000		

RENSTRA DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2025–2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				0		0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	0	0	1	0	1	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000		
3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota				0		0		75.000.000		75.000.000		125.000.000		
Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	1	0	0	1	0	1	75.000.000	1	75.000.000	1	125.000.000		
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				75.764.290		145.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000		
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Kepatuhan Industri (%)	0,87	3,49	75.764.290	3,93	145.000.000	4,37	145.000.000	4,8	145.000.000	5,24	145.000.000	2.17.3.31.3.29.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				75.764.290		145.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000		

RENSTRA DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2025–2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya legalitas usaha IKM	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	10	14	75.764.290	16	145.000.000	18	145.000.000	20	145.000.000	22	145.000.000		
3.31.03.2.01.0004 - Fasilitas verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)				75.764.290		145.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000		



RENSTRA DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2025–2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	10	14	75.764.290	16	145.000.000	18	145.000.000	20	145.000.000	22	145.000.000		
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				92.373.750		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		

RENSTRA DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2025–2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya ketersediaan informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	Persentase Kepatuhan Pelaporan SIINas (%)	30,57	32	92.373.750	33	300.000.000	34	300.000.000	35	300.000.000	36	300.000.000	2.17.3.31.3.29.01 .0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIA N	
3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				92.373.750		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	2	2	92.373.750	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1	0		2		2		2		2			

RENSTRA DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2025–2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	3	0		3		3		3		3			
3.31.04.2.01.0001 - Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				0		115.000.000		115.000.000		115.000.000		115.000.000		
Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1	0	0	2	115.000.000	2	115.000.000	2	115.000.000	2	115.000.000		
3.31.04.2.01.0002 - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				0		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		
Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	3	0	0	3	120.000.000	3	120.000.000	3	120.000.000	3	120.000.000		

RENSTRA DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2025–2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				92.373.750		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		
Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	2	2	92.373.750	2	65.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000		

#### **4.2 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kapasitas UMKM agar tangguh dan mandiri. Untuk mencapai "outcome" ini, beberapa kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan meliputi Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro dan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro. Selain itu, program ini juga berfokus pada Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan guna memperkuat ekosistem pemberdayaan UMKM. Upaya lain yang dilakukan adalah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitiitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan, yang merupakan langkah konkret untuk membangun UMKM yang lebih profesional.

Program kedua, Program Pengembangan UMKM, memiliki "outcome" yang lebih spesifik, yaitu meningkatkan daya saing UMKM. Kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan ini mencakup berbagai aspek esensial dalam operasional bisnis. Ini meliputi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi. Dengan fokus pada elemen-elemen ini, program ini bertujuan untuk memperkuat fondasi UMKM agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif, baik dari sisi kualitas produk, strategi pemasaran, efisiensi sumber daya manusia, maupun pemanfaatan teknologi terkini



Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>2.17.3.31.3.29.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN</b>				
1.	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang mandiri	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
			2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
			2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
			2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
			2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
2.	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
			2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	

4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) DKUMKMP Kota Balikpapan 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan merupakan pedoman penetapan rencana strategis Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan.

Indikator kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan dalam lima tahun mendatang merupakan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Balikpapan. Adapun indikator kinerja dalam rencana strategis Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan disajikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELIN E TAHUN	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
2.17.3.31.3.29.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN									
1	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	0,2	0,2	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25
2	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	%	4,43	4,55	4,64	4,71	4,76	4,80	4,82
3	Realisasi Pertumbuhan Produktivitas Industri Pengolahan	%	3,02	3,05	3,07	3,1	3,12	3,14	3,15
4	Persentase Koperasi berkualitas	%	64,06	64,34	64,62	64,89	65,15	65,41	65,67
5	Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro	%	3,68	3,70	3,72	3,76	3,8	3,85	3,92
6	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	63,3	68,7	69,4	70,8	71,5	72,9	73,6
7	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi Industri Pengolahan	%	5,48	5,50	5,52	5,54	5,56	5,58	5,60



Berdasarkan tabel yang disajikan, terlihat target indikator kinerja untuk periode 2025 hingga 2030 yang berfokus pada sektor koperasi, UMKM, dan industri pengolahan. Tabel ini memuat berbagai indikator kunci yang menunjukkan sasaran pembangunan ekonomi daerah.

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB ditargetkan stabil di angka 0.24% hingga 0.25%, menunjukkan kontribusi koperasi yang konsisten terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Persentase usaha mikro yang naik kelas ditargetkan meningkat secara bertahap dari 4.55% menjadi 4.82%, mencerminkan upaya dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro. Selain itu, realisasi pertumbuhan produktivitas industri pengolahan juga ditargetkan meningkat dari 3.05% menjadi 3.15%, menunjukkan fokus pada peningkatan efisiensi dan output di sektor industri.

Indikator lain yang tak kalah penting adalah persentase potensi koperasi berkualitas yang ditargetkan mencapai angka sangat tinggi, yaitu dari 92.67% hingga 99.38%, menunjukkan komitmen kuat terhadap peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Persentase pertumbuhan omset usaha mikro juga ditargetkan meningkat dari 3.70% menjadi 3.92%, sementara persentase pertumbuhan nilai produksi industri pengolahan ditargetkan meningkat dari 5.50% menjadi 5.60%. Terakhir, nilai AKIP Perangkat Daerah ditargetkan meningkat dari 79.00 menjadi 84.00, yang menunjukkan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Secara keseluruhan, tabel ini menggambarkan target yang terukur dan bertahap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

#### **4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) DKUMKMP Kota Balikpapan 2025-2029**

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan yang berkaitan dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Perindustrian (DKUMKMP), terdapat beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi fokus utama. Indikator-indikator ini mencerminkan sasaran strategis dalam pengembangan sektor koperasi, UMKM, dan industri

Secara keseluruhan, IKK ini berfungsi sebagai alat ukur yang terukur dan terperinci untuk mengevaluasi capaian program dan kegiatan DKUMKMP Kota Balikpapan. Target-target yang ditetapkan menunjukkan komitmen dinas dalam meningkatkan daya saing, produktivitas, dan kontribusi sektor koperasi, UMKM, dan industri terhadap perekonomian daerah.



Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	Definisi Operasional	Formulasi	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)			(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.17.3.31.3.29.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN												
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI											
1	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah, Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.	Volume usaha koperasi daerah dibagi PDRB ADHB dikali 100 persen	%	0,2	0,2	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	Tujuan / Indikator Pusat
2	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	Usaha mikro naik kelas adalah usaha mikro yang memenuhi salah satu indikator peningkatan omset usaha, akses pembiayaan, perluasan pasar, peningkatan kualitas produk, serta peningkatan kapasitas dan keterampilan pelaku usaha mikro	Jumlah usaha mikro naik kelas tahun N dikurang usaha mikro naik kelas tahun (N-1) dibagi dengan jumlah usaha mikro naik kelas tahun N-1 dikali 100 persen	%	4,43	4,55	4,64	4,71	4,76	4,8	4,82	Tujuan

NO	INDIKATOR	Definisi Operasional	Formulasi	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
(01)	(02)			(03)	(04)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	(11)
3	Realisasi Pertumbuhan Produktivitas Industri Pengolahan	Produktivitas industri pengolahan merupakan pembagian nilai produksi dibagi dengan nilai bahan baku. (Sumber data: SIINas)	Realisasi produktivitas industri pengolahan tahun N dikurang Realisasi produktivitas industri pengolahan tahun N-1 dibagi realisasi produktivitas industri pengolahan tahun N-1 dikali 100 persen	%	3,02	3,05	3,07	3,1	3,12	3,14	3,15	Tujuan
4	Persentase Koperasi berkualitas	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pembilang Jumlah koperasi yang masih aktif dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 kali setahun pada tahun n yang meningkat volume usaha dan asset.</li><li>▪ Penyebut Jumlah seluruh koperasi yang masih aktif sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 kali setahun pada tahun n</li></ul>	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset dibagi Jumlah seluruh Koperasi aktif dikali 100 persen	%	64,06	64,34	64,62	64,89	65,15	65,41	65,67	Sasaran / LPPD / Inmendagri No 2 Tahun 2025
5	Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro	jumlah total pendapatan yang diperoleh suatu usaha mikro dari hasil penjualan barang atau jasa dalam periode tertentu sebelum dikurangi biaya dan pengeluaran.	( Jumlah omset usaha mikro tahun N dikurang Jumlah omset usaha mikro tahun (N-1) ) dibagi dengan jumlah omset usaha mikro tahun N-1 dikali 100 persen	%	3,68	3,7	3,72	3,76	3,8	3,85	3,92	Sasaran / Inmendagri

NO	INDIKATOR	Definisi Operasional	Formulasi	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
(01)	(02)			(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
6	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi Industri Pengolahan	Jumlah keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh industri pengolahan dalam periode tertentu, (sumber data: SIINas)	(Realisasi nilai produksi industri pengolahan tahun N dikurang dengan nilai produksi industri tahun N-1) dibagi dengan nilai produksi industri tahun N-1 dikali 100 persen	%	5,48	5,5	5,52	5,54	5,56	5,58	5,6	Sasaran
7	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja instansi tersebut dalam periode satu tahun	diperoleh dari evaluasi internal yang dilakukan oleh inspektorat daerah (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Nilai Evaluasi AKIP = Nilai komponen perencanaan kinerja+ Nilai komponen pengukuran kinerja+ Nilai Komponen Pelaporan Kinerja+ Nilai Evaluasi Akuntabilitas	Nilai	63,3	68,7	69,4	70,8	71,5	72,9	73,6	Sasaran

NO	INDIKATOR	Definisi Operasional	Formulasi	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
(01)	(02)			(03)	(04)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	(11)
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau penyedia layanan publik	Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan perubahan/pemutakhirannya	Nilai	82,45	83	84	85	86	87	88	Program
9	Persentase Koperasi Sehat	koperasi yang dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi anggotanya, serta dapat menjaga keberlanjutan usaha, Koperasi Sehat memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. Tata Kelola yang Baik: Dikelola secara demokrasi dengan prinsip-prinsip perkoperasian yang kuat. 2. Profil Risiko yang Terkendali: Mampu mengelola risiko dengan baik. 3. Kinerja Keuangan yang Baik: Menunjukkan kinerja keuangan yang baik dan transparan. 4. Permodalan yang Kuat: Memiliki permodalan yang cukup dan memadai.	Jumlah Koperasi Sehat dibagi Jumlah Koperasi Aktif dikali 100 persen	%	4,69	4,94	6,17	7,41	8,64	9,88	11,11	Program / Permen Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020

NO	INDIKATOR	Definisi Operasional	Formulasi	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
(01)	(02)			(03)	(04)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	(11)
10	Persentase SDM Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya	Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan adalah ukuran yang menunjukkan proporsi koperasi yang menerima bantuan dalam bentuk pelatihan, bimbingan teknis, atau pengembangan kapasitas dibandingkan dengan total koperasi yang aktif dalam suatu periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase (%).	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat pemahamannya melalui pelatihan, bimbingan teknis, atau pengembangan kapasitas dibagi jumlah SDM Koperasi aktif dikali 100 persen	%	6,25	4,94	6,17	6,42	6,67	6,91	7,16	Indikator Program
11	Persentase Koperasi Aktif	Koperasi Aktif adalah ukuran yang menunjukkan proporsi koperasi yang masih menjalankan kegiatan usaha secara aktif dibandingkan dengan total koperasi yang terdaftar dalam suatu periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase (%).	Jumlah Koperasi aktif dibagi jumlah total koperasi terdaftar dikali 100 persen	Persentase	23,44	25,95	26,21	26,46	26,71	26,96	27,21	Indikator Program / Indikator Inmendagri No 2 Tahun 2025
12	Pertumbuhan Usaha Mikro Formal	usaha mikro formal adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan memiliki legalitas usaha berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Sumber data: OSS)	Jumlah Usaha Mikro formal Tahun N dikurang Jumlah Usaha Mikro formal Tahun N-1 DIBAGI Jumlah usaha mikro formal Tahun N-1 dikali 100 persen	%	1,25	1,35	1,39	1,83	2,03	2,09	2,13	Indikator Program / Indikator Inmendagri No 2 Tahun 2025

NO	INDIKATOR	Definisi Operasional	Formulasi	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
(01)	(02)			(03)	(04)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	(11)
13	Persentase jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi	Usaha mikro yang difasilitasi yaitu usaha mikro yang diberikan fasilitas dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia serta daya saing usahanya berupa pembinaan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, serta Desain dan Teknologi.	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi dibagi Jumlah Usaha Mikro Binaan dikali 100 persen	%	11,14	11,63	11,93	11,98	12,5	12,7	12,72	Indikator Program
14	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Seluruh Jumlah industri kecil dengan ketentuan mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan Nilai Investasi memiliki kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan Jumlah Industri menengah dengan ketentuan a. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); b. mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). pada tahun pelaporan di wilayah kabupaten/kota dikurangi tahun pelaporan pada sebelumnya	Jumlah IKM tahun n dibagi Jumlah IKM tahun n-1 dikali 100 persen	%	0,97	1,15	1,32	1,49	1,66	1,81	1,96	Indikator Program

NO	INDIKATOR	Definisi Operasional	Formulasi	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
(01)	(02)			(03)	(04)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	(11)
15	Persentase Kepatuhan Industri	Kepatuhan industri diukur melalui hasil Pemantauan dan Pengawasan Perizinan Sektor Perindustrian (Pemeriksaan kesesuaian antara pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri dengan kondisi lapangan)	Jumlah izin usaha yang diawasi dibagi jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait dikali 100 persen	%	0,87	2,18	3,49	3,93	4,37	4,8	5,24	Indikator Program
16	Persentase Kepatuhan Pelaporan SIINas	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini mengacu pada ketersediaan data dan informasi yang menyeluruh dan terbaru mengenai sektor industri. Informasi ini mencakup berbagai aspek industri seperti data produksi, distribusi, izin usaha, kepatuhan terhadap regulasi, perkembangan teknologi, tenaga kerja, serta informasi keuangan dan pasar. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku industri, investor, dan masyarakat, memiliki akses ke informasi yang akurat dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien.	total IKM yang melapor di SIINas dibagi dengan IKM yang terdaftar di SIINas dikali 100 persen	%	30,57	31	32	33	34	35	36	Indikator Program

NO	INDIKATOR	Definisi Operasional	Formulasi	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
(01)	(02)			(03)	(04)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	(11)
17	Persentase Industri yang Memanfaatkan EBT	Perusahaan industri yang memanfaatkan Energi terbarukan berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.	Jumlah Industri yang memanfaatkan EBT dibagi dengan jumlah seluruh industri dikali 100 persen	%	0	0	0	0,26	0,52	0,79	1,05	Indikator Program
18	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pembilang Jumlah Usaha mikro yang menjadi wirausaha adalah pelaku usaha mikro yang memiliki kriteria sebagai berikut: Jenis barang/komoditi usahanya tetap, memiliki tempat usaha yang tetap, sudah memiliki administrasi keuangan, sudah memisahkan antara keuangan keluarga dan usaha, pengusahanya sudah mendapatkan pelatihan jiwa wirausaha, sudah memiliki akses ke lembaga keuangan, sudah memiliki izin usaha (NIB) atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.</li><li>▪ Penyebut keseluruhan jumlah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, dengan modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan atau berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar dari Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).</li></ul>	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dibagi Jumlah usaha mikro keseluruhan dikali 100 persen	%	1,33	1,35	1,36	1,37	1,38	1,4	1,41	Indikator LPPD / Indikator Inmendagri No 2 Tahun 2025



NO	INDIKATOR	Definisi Operasional	Formulasi	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
(01)	(02)			(03)	(04)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	(11)
19	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pembilang Seluruh Jumlah industri kecil dengan ketentuan mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan Nilai Investasi memiliki kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan Jumlah Industri menengah dengan ketentuan<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);</li><li>b. mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). pada tahun pelaporan di wilayah kabupaten/kota dikurangi tahun pelaporan pada sebelumnya.</li></ul></li><li>▪ Penyebut Seluruh Jumlah industri kecil dengan ketentuan mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan Nilai Investasi memiliki kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan Jumlah Industri</li></ul>	Jumlah industri kecil dan menengah tahun n – Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 dibagi Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 dikali 100 persen	%	13,79	15,15	15,79	15,91	17,65	18,33	19,72	Indikator LPPD

NO	INDIKATOR	Definisi Operasional	Formulasi	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
(01)	(02)			(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
20	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ke-5 sasaran pembangunan industri daerah merupakan sasaran yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Industri Propinsi (RPIK) dalam jangka panjang dan wajib ditentukan sasaran tahunannya dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan. Target tahunan tersebut selanjutnya akan dijadikan tolak ukur pencapaian di akhir tahun</li><li>▪ Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data ekspor industri pengolahan nonmigas di daerah asal barang</li><li>▪ Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data industri skala besar, menengah dan kecil yang telah memiliki perizinan berusaha</li><li>▪ Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data total penyerapan tenaga kerja oleh industri pengolahan nonmigas dalam satu tahun;</li><li>▪ Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota (RPIK) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Kabupaten/kota untuk jangka waktu 20</li></ul>	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan yang disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut dan setiap sasaran memiliki bobot 20%. dokumen perencanaan pembangunan industri daerah yang terdiri dari: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota (satuan persentase) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Pertumbuhan	%	62,69	63,69	64,69	65,69	66,69	67,69	68,69	Indikator LPPD

[illegible]



[illegible]

NO	INDIKATOR	Definisi Operasional	Formulasi	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
(01)	(02)			(03)	(04)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	(11)
25	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Kredit UMKM merupakan semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pemberi pinjaman (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat atau BPR) dengan bank lain dan pihak ketiga bukan bank yang memenuhi kriteria usaha sesuai undang-undang tentang UMKM yang berlaku. Total Kredit adalah semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pemberi pinjaman (tidak termasuk BPR) dengan bank lain dan pihak ketiga bukan bank secara total.	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit diperoleh dengan membagi jumlah kredit UMKM dengan total kredit dikali dengan 100 persen	(%)	34,81	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	Indikator SDGS
26	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri.	Industri Kecil adalah usaha industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, termasuk pemilik dan pekerja keluarga. Nilai tambah industri kecil merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (pengurangan output dengan input antara) yang dihasilkan oleh industri kecil.	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri diperoleh dengan membagi nilai tambah industri kecil dibagi dengan total nilai tambah industri dikalikan dengan 100 persen.	(%)	2,27	2,35	2,43	2,51	2,59	2,67	2,75	Indikator SDGS

(01)	(02)			(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
27	Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur	Industri manufaktur secara luas didefinisikan sebagai “transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru,” terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB merefleksikan total pendapatan yang diterima oleh factor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu periode (setahun). Perhitungan indikator ini menggunakan PDB Atas Dasar Harga Konstan.	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur dapat diperoleh dengan mengurangi nilai tambah industri manufaktur pada tahun ke - t terhadap nilai tambah industri manufaktur pada tahun ke t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai tambah industri manufaktur pada tahun ke t-1, dikalikan dengan 100 persen	(%)	-0,04	3,98	4,34	4,7	5,07	5,43	5,79	Indikator SDGS

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perindustrian (DKUMKMP) Kota Balikpapan berlaku selama lima tahun, dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen perencanaan ini memuat rumusan yang komprehensif, mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Renstra DKUMKMP Kota Balikpapan diharapkan dapat memperkuat peran berbagai pemangku kepentingan dalam melaksanakan rencana kinerja. Dokumen ini juga berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan perangkat daerah. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Renstra DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sangat bergantung pada dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Renstra DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, diharapkan dokumen ini menjadi pedoman dan acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan DKUMKMP. Dengan demikian, dinas ini dapat mengakomodasi kepentingan dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, berkoordinasi dengan perangkat daerah lain, dan memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Kota Balikpapan.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan di Indonesia memiliki dasar, yaitu Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) PD untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun. Renstra disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, setiap perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode lima tahunan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui peningkatan investasi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.

Sebagai kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan dihadapkan pada tantangan dan peluang besar dalam sektor penanaman modal dan pelayanan publik. Oleh karena itu, perencanaan strategis yang matang dan terarah menjadi kebutuhan mutlak agar DPMPTSP dapat menjawab dinamika pembangunan dan perubahan kebijakan nasional maupun daerah secara adaptif dan responsif.

Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 dan mengacu pada Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur serta Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja), pengukuran kinerja, serta pengawasan dan evaluasi capaian program dan kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Balikpapan.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis DPMPSTSP Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
12. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
13. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Timur;
14. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
15. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
27. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
28. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur DPMPSTP;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 2042;

39. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
40. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
41. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
42. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029 untuk menyiapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman/penuntun yang dapat memberikan gambaran kondisi yang akan dicapai, arah kebijakan, strategi yang diambil untuk mencapai sasaran dalam kerangka pencapaian visi dan misi, sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan pada setiap akhir tahun dalam kurun waktu lima tahun kedepan dalam upaya pengembangan investasi penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Balikpapan.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029, sehingga setiap tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
2. Memberikan arahan kebutuhan program dan kegiatan prioritas yang jelas hingga pelaksanaan kegiatan bisa terwujud secara efektif, efisien dan optimal. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan DPMPSTSP sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah;
3. Memudahkan pemahaman seluruh jajaran Manajemen dan Aparatur dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dalam melaksanakan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur untuk mencapai tujuan sesuai tugas dan fungsinya masing masing.
4. Sebagai instrumen tolak ukur dan kendali untuk mengevaluasi/penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan untuk masa periode tahun 2025 - 2029.
5. Sebagai dasar komitmen bersama seluruh jajaran aparatur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan terhadap program program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih di Kota Balikpapan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Daerah, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.
- 1.2 Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan Tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- 1.4 Sistematika Penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPSTP KOTA BALIKPAPAN**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut IKK untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan Bagian ini mengemukakan mitra perangkat daerah dalam pemberian layanan, dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah, dan kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

- 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB III ISU – ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2. Penentuan Isu-isu Strategis. Pada bagian ini direview kembali faktor faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari : Gambaran pelayanan Perangkat Daerah; Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Resntra Perangkat Daerah. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah tahun 2024 – 2026 dan/atau Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.
- 4.2. Cascading kinerja  
Perangkat Daerah Cascading kinerja Perangkat Daerah mluai dari tujuan,sasaran,outcame dan output serta indikator masing – masing.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 7.1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
- 7.2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

### **BAB VIII PENUTUP**

## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Tugas ini meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, dan pengendalian di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

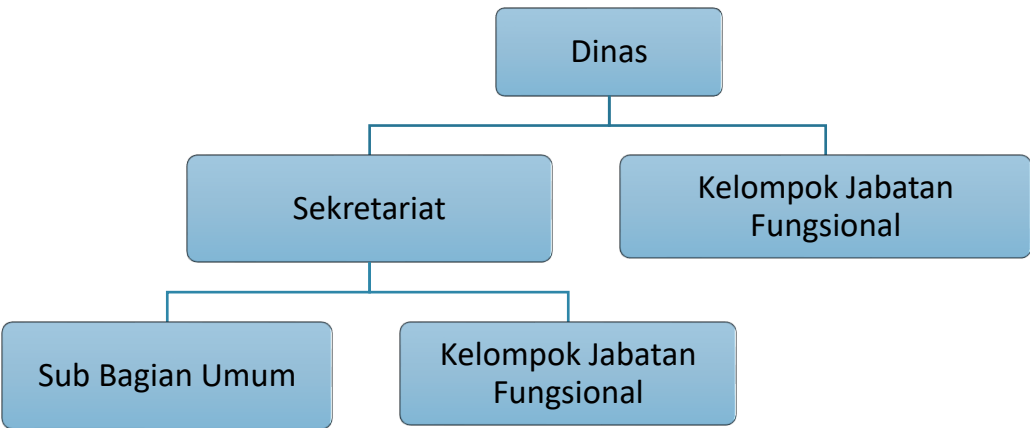
- a. penyusunan program dan kegiatan pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan peningkatan pelayanan perizinan terpadu;
- c. perumusan kebijakan sistem pelayanan perizinan terpadu;
- d. perumusan kebijakan dan pengelolaan sistem pengaduan masyarakat;
- e. penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
- f. pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- g. penyelenggaraan pengembangan dan promosi potensi daerah;
- h. pengolahan data dan informasi serta evaluasi kegiatan penanaman modal;
- i. pelaksanaan sistem pelayanan perizinan terpadu sesuai kewenangan yang didelegasikan;
- j. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pemrosesan berkas perizinan yang didelegasikan secara terpadu;
- k. penandatanganan perizinan sesuai kewenangan yang diberikan;
- l. pengelolaan data secara manual dan elektronik sesuai kewenangan;
- m. penyelenggaraan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait dalam proses pengawasan dan pengendalian perizinan/non perizinan yang diterbitkan;
- n. pengoordinasian dan penyampaian dokumen salinan perizinan kepada perangkat Daerah terkait dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis;
- o. penyediaan informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan sesuai dengan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 terdiri dari :

- a) Dinas;
- b) Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c) Kelompok Jabatan Fungsional;

Gambar 2.1

Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

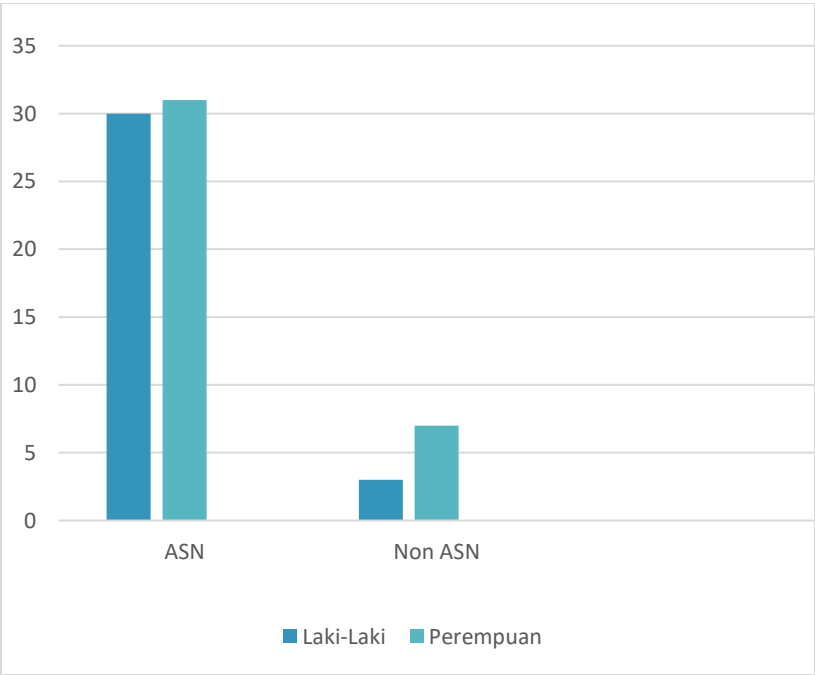
2.2.1. Sumber Daya Manusia / Kepegawaian

Dalam Rangka menjalankan kegiatan administrasi dan operasionalnya, DPMPTSP Kota Balikpapan sudah didukung oleh aparatur pelayanan penanaman modal dengan jumlah personil sebanyak 71 orang terdiri dari 61 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 10 Orang Non ASN dengan rincian sebagai berikut :

Grafik 2.1

Jumlah Aparatur DPMPTSP berdasarkan jenis kelamin

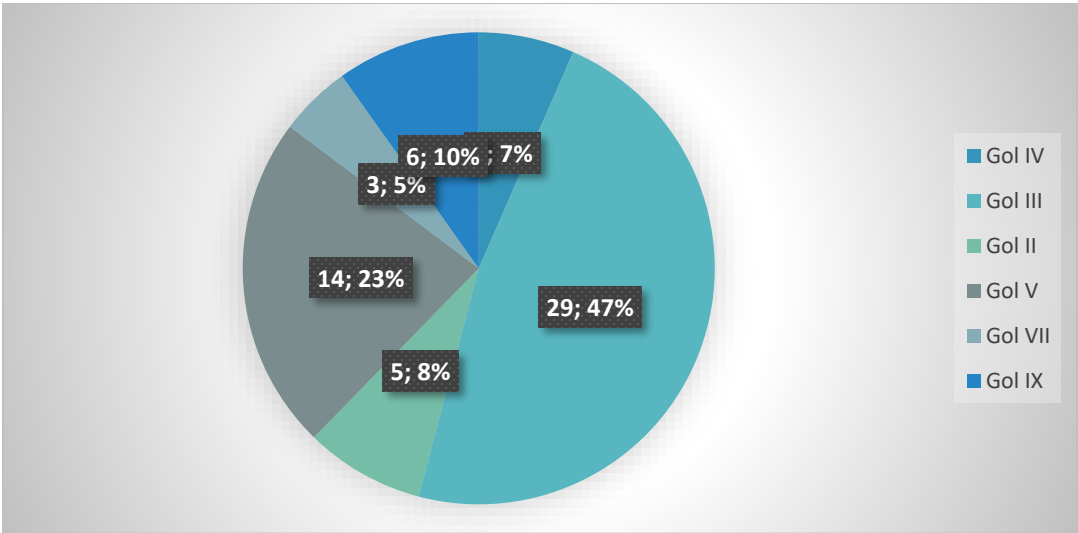




**Tabel 2.1**  
**Jumlah Aparatur berdasarkan Eselon / Non Eselon**

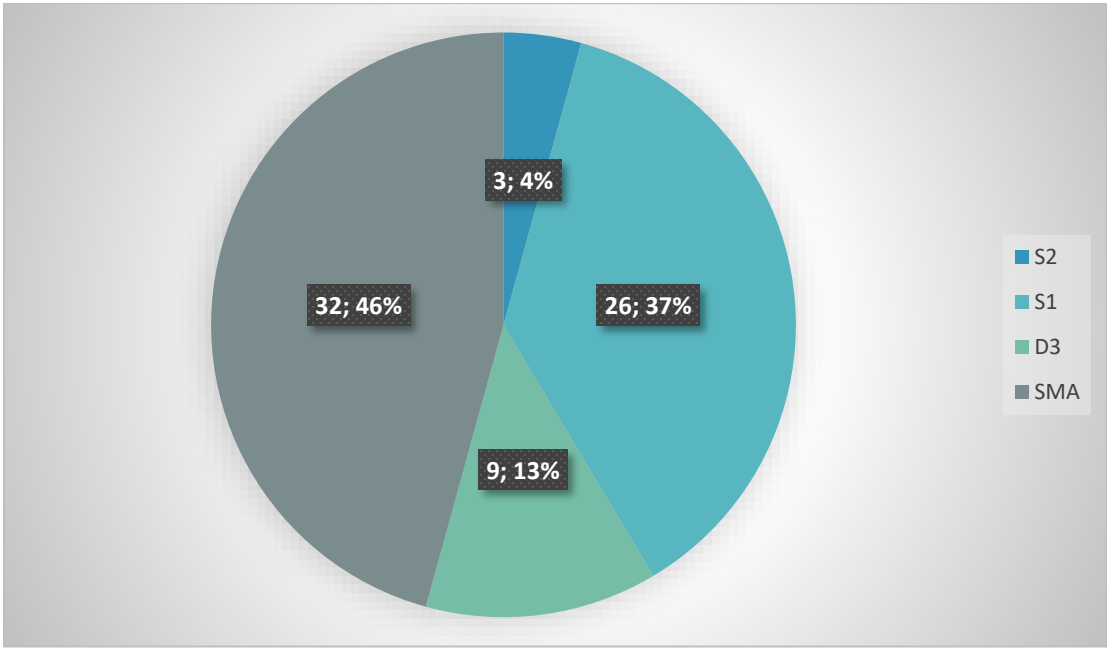
No	Eselon/Non Eselon	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	Kepala Dinas	1 Orang
2.	Eselon III	Sekretaris	1 Orang
3.	Eselon IV	Kasubbag Umum	1 Orang
4.	Fungsional	Jabatan Fungsional	12 Orang
5.	Non Eselon	Staf	46 Orang
6.	Non ASN	Staf	10 Orang
Jumlah Keseluruhan			71 Orang

**Grafik 2.2**  
**Jumlah Aparatur DPMPTSP berdasarkan golongan**



Grafik 2.3

Jumlah Aparatur DPMPSTP berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata aparatur DPMPSTP Kota Balikpapan golongan III dengan 29,47% atau 29 orang serta dengan tingkat pendidikan SMA dengan 32,46% atau 32 orang.

2.2.2. Sarana dan Prasarana Perkantoran

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja, DPMPSTP Kota Balikpapan memiliki sarana dan prasarana sebagaimana disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2

Sarana Prasarana DPMPSTP kota Balikpapan

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Unit	1
2	Telephone (PABX)	Unit	1
3	Telephone Mobile	Unit	3

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah
4	Handy Talky (HT)	Unit	4
5	Facsimile	Unit	1
6	Alat Komunikasi Sosial Lainnya	Unit	2
7	Alat Kedokteran Umum Lainnya	Unit	2
8	Video Printer	Unit	1
9	Distiling Apparatus	Unit	6
10	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Dasar Lainnya	Unit	1
11	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Lanjutan Lainnya	Unit	1
12	Layar	Unit	1
13	Recorder Display Lainnya	Unit	10
14	Uninterrupted Power Supply	Unit	1
15	Air Purlier	Unit	10
16	Target Drone	Unit	3
17	Local Area Network	Unit	2
18	P.C Unit	Unit	106
19	Laptop	Unit	19
20	Note Book	Unit	30
21	Tablet PC	Unit	32
22	Personal Komputer Lainnya	Unit	2
23	CPU	Unit	1
24	Hard Disk	Unit	3
25	Peralatan Mainframe Lainnya	Unit	1
26	Scanner	Unit	4
27	CPU	Unit	2
28	Monitor	Unit	3
29	Printer	Unit	108
30	Scanner	Unit	2
31	External	Unit	2
32	Mesin Antrian	Unit	1
33	Papan Nama Instansi	Unit	3
34	Papan Pengumuman	Unit	26
35	Alat Kantor Lainnya	Unit	89
36	Meja Kerja Besi/Metal	Unit	2
37	Meja Kerja Kayu	Unit	4
38	Kursi Besi/Metal	Unit	63
39	Meja Rapat	Unit	2
40	Tempat Tidur Besi	Unit	1
41	Meja Tambahan	Unit	1
42	Kursi Rapat	Unit	4
43	Kursi Tamu	Unit	7
44	Kursi Putar	Unit	1
45	Kursi Lipat	Unit	6
46	Sofa	Unit	11
47	Meubeleur Lainnya	Unit	2
48	Lemari Es	Unit	2
49	A.C Window	Unit	3
50	A.C Split	Unit	9
51	Televisi	Unit	32

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah
52	Loudspeaker	Unit	1
53	Sound System	Unit	4
54	Wireless	Unit	2
55	Microphone	Unit	2
56	Unit Power Supply	Unit	14
57	Camera Video	Unit	1
58	Tangga Aluminium	Unit	2
59	Dispenser	Unit	5
60	Gordyin/Kray	Unit	2
61	Bracket Standing Peralatan	Unit	4
62	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Unit	2
63	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	8
64	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Unit	2
65	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	Unit	2
66	Audio Visual	Unit	1
67	Microphone/Wireless MIC	Unit	3
68	Uninterrupted Power Supply	Unit	27
69	Peralatan Studio Audio Lainnya	Unit	4
70	Off Air TV Monitor	Unit	4
71	Camera Elektronik	Unit	2
72	Layar Film/Projector	Unit	4
73	Camera Digital	Unit	2
74	Camera Conference	Unit	4
75	Mesin Barcode	Unit	1
76	Portabel Generating Set	Unit	1
77	Station Wagon	Unit	9
78	Micro Bus	Unit	1
79	Mini Bus	Unit	5
80	Sepeda Motor	Unit	18
81	R O L	Unit	1
82	Multisester Digital	Unit	2
83	Global Positioning System	Unit	7
84	Alat Ukur Universal Lainnya	Unit	2
85	Termometer Standar	Unit	1
86	Alat Ukur Lain-Lain Lainnya	Unit	1
87	Rak-Rak Penyimpan	Unit	7
88	Mesin Ketik Manual Portabel	Unit	1
89	Mesin Ketik Manual Standard	Unit	2
90	Mesin Hitung/Mesin Jumlah Lainnya	Unit	2
91	Mesin Fotocopy Folio	Unit	1
92	Lemari Besi/Metal	Unit	18
93	Rak Besi	Unit	38
94	Rak Kayu	Unit	5
95	Filing Cabinet Besi	Unit	15
96	Brandkas	Unit	2
97	CCTV	Unit	4
98	Alat Penghancur Kertas	Unit	3
99	Mesin Absensi	Unit	4
100	LCD Projector/Infocus	Unit	1
101	Alat Sidik Jari	Unit	2

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah
102	External/Portabel Hardisk	Unit	4
103	Peralatan Personal Komputer Lainnya	Unit	9
104	Server	Unit	3
105	Router	Unit	1
106	Modem	Unit	1
107	Peralatan Jaringan Lainnya	Unit	4
108	Air Conditioning	Unit	10
109	Peralatan Permainan Lainnya	Unit	1
110	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	2
111	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	Unit	1
112	Buku Umum Lain-Lain	Unit	26
113	CD/VCD/DVD/LD	Unit	2
114	Peta	Unit	1
115	Blue Print	Unit	1
116	Lisensi dan Frenchise	Unit	1
117	Software	Unit	3
118	Software Lainnya	Unit	5
119	Kajian	Unit	1
120	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Unit	4

Sumber data : KIP DPMPTSP Kota Balikpapan

**2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja penyelenggaraan pelayanan merujuk pada pengukuran dan penilaian terhadap kualitas serta efektivitas pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi atau organisasi kepada masyarakat. Pada sub bab ini menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan DPMPTSP Kota Balikpapan. Capaian Kinerja penyelenggaraan Pelayanan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Realisasi Investasi (Triliun Rp.)				3.018	3.169	3.328	3.530	3.780	14.369	19.593	15.426	24.125	25.705	4.76	6.18	4.64	6.83	6.80
2	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi				100	100	100	100	100	819	731	110	140	128	8.19	7.31	1.10	1.40	1.28
3	Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat				0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.20	0.73	4.71	2.01	0.39	1.82	6.64	42.82	18.27	3.55
4	Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan*						75	75.5	75.6			73.91	75.32	77.62			0.99	1.00	1.03
5	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal				N/A	5	5	5	5	N/A		0	0	0	N/A		0.00	0.00	0.00
6	Presentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah				30	75	80	85	90			80	85	95			1.00	1.00	1.06
7	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya				N/A	100	100	100	100	N/A		100	100	100	N/A		1.00	1.00	1.00
8	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berlaku Efektif				83.45	83.5	84	85	86			91.035	94.44	96			1.08	1.11	1.12
9	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan				66	66.5	67	68	69			88.17	96.63	97.53			1.32	1.42	1.41
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				75.23	77	78	79	80			78.02	92.77	94			1.00	1.17	1.18

**Tabel 2.4**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu**

**Pintu Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke - ('000)					Realisasi anggaran pada tahun ke - ('000)					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1,200	249,994	425,761	167,500	185,250	1,200	15,707	406,690	156,864	135,386	1.00	0.06	0.96	0.94	0.73	15337.50	11182.14
2	Program Promosi Penanaman Modal	18,451	300,000	664,995	4,101,000	693,674	18,451	197,184	657,024	3,594,844	662,922	1.00	0.66	0.99	0.88	0.96	3659.58	3492.91
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	146,985	564,890	713,127	575,260	1,239,202	146,835	422,658	537,317	535,341	991,091	1.00	0.75	0.75	0.93	0.80	743.08	574.97
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	279,080	999,002	811,999	751,939	918,391	268,114	716,288	779,285	698,924	812,142	0.96	0.72	0.96	0.93	0.88	229.08	202.91
5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	375,358	980,934	570,485	374,320	462,914	358,534	916,285	551,749	365,557	426,499	0.96	0.93	0.97	0.98	0.92	23.33	18.96
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2,758,312	11,754,911	11,883,548	19,094,281	13,920,853	12,510,698	10,196,683	10,146,275	17,075,446	12,331,324	0.91	0.87	0.85	0.89	0.89	404.69	391.15

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

### **2.4.1 Analisis Lingkungan Internal**

Dari hasil observasi terhadap lingkungan internal Pemerintah Kota Balikpapan, diperoleh suatu gambaran kondisi tentang kekuatan maupun kelemahan, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

#### **a) Kekuatan (Strengths)**

1. Pemanfaatan layanan digital (OSS RBA untuk perizinan berusaha, kanal antrian/track status, loket terintegrasi/MPP) yang terus membaik;
3. SDM frontliner berpengalaman, budaya pelayanan cukup kuat, dan jejaring koordinasi lintas-OPD sudah terbentuk;
4. Reputasi Balikpapan sebagai kota jasa & energi dengan ekosistem usaha mapan (perbankan, jasa profesional, logistik);
5. Kedekatan dengan pusat pemerintahan baru (IKN) menambah daya tarik investor dan arus informasi/regulasi;

#### **b) Kelemahan (Weakness)**

1. Masih lemahnya koordinasi dengan OPD Teknis Terkait dan adanya tumpang tindih kewenangan terkait Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
2. Sarana dan Prasarana, Fasilitas dan Sistem Teknologi Informasi yang belum sepenuhnya optimal di semua lini pelayanan;
3. Masih Kurangnya Pemahaman Masyarakat dan Pelaku Usaha terkait Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara online;
4. Regulasi/Kebijakan Pusat yang berubah-ubah dan tumpang tindih sehingga sulit untuk menyesuaikan dan beradaptasi dengan situasi dan kondisi di Kota Balikpapan.

### **2.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal**

Dari hasil observasi terhadap lingkungan Eksternal Pemerintah Kota Balikpapan pada umumnya, diperoleh suatu gambaran kondisi tentang peluang maupun tantangan, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

#### **a) Peluang (Opportunities)**

1. Kota Balikpapan sebagai salah satu dari tiga Kota Penyangga Ibu Kota Negara (IKN) membuka peluang besar untuk investasi baru di berbagai sektor;
2. Penerapan Jaringan komunikasi dan teknologi informasi semakin meluas dan berperan dalam dunia e-commerce dan bisnis investasi;
3. Peluang kemitraan untuk menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk menarik minat investor terhadap sektor-sektor infrastruktur, properti dan pariwisata;
4. Situasi keamanan dan ketertiban Kota Balikpapan yang kondusif.



**b) Tantangan (Threats)**

1. Adanya Persaingan Antar Daerah lain di Kalimantan yang berlomba untuk menarik minat Investor, sehingga harus terus meningkatkan daya saing;
2. Perubahan Regulasi/kebijakan pusat dan daerah yang berubah-ubah dapat mempengaruhi iklim investasi;
3. Pelayanan Berbasis Digital rentan terhadap serangan siber jika tidak dilengkapi sistem keamanan yang memadai;
4. Kondisi Ekonomi Global yang mengalami Resesi atau krisis ekonomi dapat mengurangi minat investor.

**2.5. Identifikasi Permasalahan dan Analisis Isu Strategis**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu khususnya di Kota Balikpapan menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi baik dimasa sekarang maupun di masa mendatang, identifikasi permasalahan sangat diperlukan sebagai acuan dalam mendapatkan Solusi yang tepat dan terarah sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kota Balikpapan diantaranya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Pemetaan Masalah DPMPSTSP Kota Balikpapan**

Masalah Pokok	Masalah	Penyebab masalah /Akar Masalah
Belum optimalnya pertumbuhan nilai realisasi investasi	Belum optimalnya regulasi dan pengembangan sektor ekonomi potensial untuk mendukung Iklim investasi	Belum terkininya regulasi terkait Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
		Belum optimalnya data potensi dan peluang investasi sebagai sumber data sektor ekonomi potensial
	Masih kurangnya Minat Investor untuk berinvestasi di Kota Balikpapan	Masih kurangnya profil atau ketersediaan informasi detail tentang peluang investasi yang siap untuk ditawarkan
	Belum optimalnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal	Belum optimalnya fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha
Belum optimalnya Pelayanan publik yang semakin prima dan adaptif transformasi digital	Belum optimalnya kualitas pelayanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Publik NonPerizinan Berusaha	Adanya perubahan regulasi yang dinamis terhadap kewenangan penerbitan Perizinan dan Non Perizinan
		Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam mengoperasikan sistem dan aplikasi Perizinan dan Non Perizinan
		Belum maksimalnya hasil survei kepuasan masyarakat
	Belum optimalnya data dan informasi yang bisa diakses oleh pelaku usaha	Belum optimalnya akses terhadap informasi perizinan dan non perizinan yang dapat diakses melalui PPID
Belum optimalnya pencapaian Nilai SAKIP	Belum optimalnya penerapan Nilai SAKIP	Kurangnya pemahaman penerapan Sakip pada Perangkat daerah

Setelah dilakukan identifikasi serta analisis permasalahan dan lingkungan yang telah dibahas sebelumnya, maka perlu dilakukan perumusan isu-isu strategis. Isu strategis adalah masalah-masalah prioritas yang harus segera ditangani untuk mencapai tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan. Identifikasi dilakukan sesuai dengan lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut disajikan tabel guna mempermudah dalam penyimpulan isu strategis :

Tabel 2.6

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis DPMPTSP Kota Balikpapan

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan an PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasiona l	Regional	
Balikpapan sebagai Kota Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan dan Kebudayaan MICE (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition)	Belum optimalnya regulasi dan pengembangan sektor ekonomi potensial untuk mendukung Iklim investasi	Industri, inovasi, dan infrastruktur	Perubahan geopolitik dan peta ekonomi dunia	Ketahanan Ekonomi	Diversifikasi ekonomi	Belum Optimalnya Realisasi Investasi
Posisi Kota Balikpapan sebagai Pintu Gerbang Kaltim, Kaltara dan Rencana Ibukota Negara Baru serta Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu	Masih kurangnya Minat Investor untuk berinvestasi di Kota Balikpapan					
Pertumbuhan start-up digital, industri kreatif, dan UMKM berbasis teknologi, terutama di kota-kota besar, yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	Belum optimalnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal					
Telah terdapat Mal Pelayanan Publik Kota Balikpapan	Belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik Perizinan Berusaha dan NonPerizinan Berusaha		Konflik antar negara	Pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan		Belum optimalnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Publik NonPerizinan Berusaha
	Belum optimalnya data dan informasi yang bisa diakses oleh pelaku usaha					
Penyelenggaraan Birokrasi yang bersih, efektif dan melayani	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik			Tiga Agenda Transformasi		Belum optimalnya Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)

Berdasarkan data pada tabel diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat tiga isu strategis yang diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan yaitu adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Realisasi Investasi
2. Belum optimalnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Publik NonPerizinan Berusaha
3. Belum optimalnya Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Perangkat daerah

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah**

Pada bab ini berisi tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dengan berdasarkan kepada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta sasaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029. Strategi dirumuskan berdasarkan rencana Tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah/Upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah. Pada bab ini juga memuat tentang penahapan Pembangunan yang dimaksudkan untuk menginformasikan prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Balikpapan.

##### **3.1.1. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Tujuan merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai sedangkan sasaran adalah adalah penjabaran lebih rinci dari tujuan, yang merupakan langkah-langkah spesifik dan terukur yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut dalam jangka waktu yang lebih pendek (biasanya tahunan). Dalam penyusunan Rencana Strategis DPMPTSP Kota Balikpapan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Balikpapan, dan sebagai penjabaran dari visi dan misi wali Kota terpilih Kota Balikpapan, dimana terdapat beberapa isu strategis menurut dokumen RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 yaitu antara lain : 1) Pembangunan Ekonomi inklusif berkelanjutan, 2) Penguatan SDM berdaya saing dan perlindungan sosial, 3) Reformasi birokrasi berdampak dan tata kelola kolaboratif, 4) pengendalian pengelolaan lingkungan hidup, dan ketahanan bencana, 5) Kualitas infrastruktur (yang terpadu) dan penataan utilitas kota, 6) Peningkatan kota cerdas dan nyaman dihuni, dan 7) Kesiapan sebagai Mitra IKN.

Dari tantangan pembangunan dan isu strategis yang telah dijabarkan diatas serta dengan memperhatikan arahan RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi Kalimantan Timur maka visi Kota Balikpapan yaitu “Balikpapan Nyaman untuk Semua 2045” dapat kita lihat korelasinya sebagai berikut

Gambar 3.1

Telaahan RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Timur serta Visi Kota Balikpapan



Sumber : Dokumen Rankhir RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

Penjabaran dari RPJPD Kota Balikpapan adalah penggalan RPJMD pada Pembangunan tahap I yaitu pada tahun 2025-2029 dengan arah kebijakan Kota Balikpapan yaitu sebagai berikut :

1. Penguatan fondasi pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
2. Penguatan ekonomi unggulan daerah
3. Tata kelola yang adaptif dan birokrasi yang berkualitas
4. Memperkuat fondasi pembangunan berketahanan dan berkelanjutan
5. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Utilitas Kota Cerdas

Sedangkan visi dan misi Wali Kota Balikpapan terpilih tahun 2025-2029 yaitu

**“ Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua dalam Bingkai Madinatul Iman “**

Dengan penjabaran misi sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan pemerintah yang bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan masyarakat;
2. Membangun dan mengembangkan infrastruktur yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat Balikpapan;
3. Membangun dan mengembangkan kehidupan sosial yang kondusif untuk menciptakan Masyarakat yang sehat dan terdidik;
4. Mengembangkan perekonomian yang tumbuh berkeadilan untuk manusia
5. Konsisten menjaga lingkungan hidup yang sehat dan nyaman untuk semua

3.1.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

A. Telaahan Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Bakan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Berdasarkan amanat peraturan dan undang – undang terhadap tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ (BKPM), visi BKPM adalah sebagai berikut :

**“Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Tujuan Investasi yang Unggul dan Berdaya Saing Melalui Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkelanjutan Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Pemerataan Pembangunan.”**

Sedangkan Misi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM adalah :

1. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan kompetitif melalui penyederhanaan regulasi, perizinan, serta pemberian insentif yang tepat sasaran.
2. Mendorong percepatan hilirisasi sumber daya alam dan industri strategis nasional guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dalam negeri.
3. Mengoptimalkan promosi investasi terintegrasi di tingkat nasional dan internasional dengan memanfaatkan potensi wilayah dan sektor unggulan Indonesia.
4. Memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek investasi serta program hilirisasi.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan investasi yang berbasis digital dan data melalui reformasi sistem pelayanan terpadu dan pemanfaatan teknologi informasi.
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyebaran investasi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal.

B. Telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Adapun Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2025 2029 adalah :

**“Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”**

Dalam rangka mewujudkan visi Gubenur dan Wakil Gubenur Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029, ditetapkan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera;
2. Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai pusat ekonomi baru yang inklusif berbasis industrialisasi komoditas unggulan daerah;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian, pelayanan publik, dan kesehatan;

- 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, dan berintegritas berbasis teknologi informasi;
- 5. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, penguatan budaya, dan kearifan lokal; dan
- 6. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Visi diatas kemudian diwujudkan melalui misi yang ditetapkan pada masing-masing level dalam rangka menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat dan terukur. Berikut penyandingan misi Astacita Presiden Republik Indonesia, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur serta RPJMD Kota Balikpapan terhadap DPMPTSP Kota Balikpapan :

Misi (Astacita) Presiden 2025-2029	Misi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM	Misi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029	Misi RPJMD Kota Balikpapan 2025-2029	DPMPTSP Kota Balikpapan
Astacita 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan kompetitif melalui penyederhanaan regulasi, perizinan, serta pemberian insentif yang tepat sasaran	Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai pusat ekonomi baru yang inklusif berbasis industrialisasi komoditas unggulan daerah	Misi 4 Mengembangkan Perekonomian yang Tumbuh Berkeadilan untuk Semua	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Publik Non Perizinan Berusaha yang Berkualitas
Astacita 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Mendorong percepatan hilirisasi sumber daya alam dan industri strategis nasional guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dalam negeri.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, dan berintegritas berbasis teknologi informasi;		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Astacita 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek investasi serta program hilirisasi			



### **3.1.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pemerintah Kota Balikpapan telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043. Dokumen ini menjadi dasar hukum dan acuan dalam penataan ruang kota, mencakup struktur ruang, polar uang, kawasan strategis serta arahan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.

Penetapan RTRW ini bertujuan untuk mengarahkan pembangunan kota secara terintegrasi dan berkelanjutan, serta mendukung sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Hal ini penting agar kebijakan pembangunan sejalan dengan prinsip ekonomi berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan yang baik.

Sebagai bagian dari penyusunan RPJMD 2025–2029, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah menetapkan Rancangan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS merupakan analisis sistematis dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam setiap kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah.

Analisis KLHS memberikan arahan bahwa dalam pembangunan daerah perlu memperhatikan kondisi lingkungan hidup, sehingga tercipta keselarasan antara pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan penggunaannya. Selain itu, dalam peraturan tersebut juga mengamanatkan adanya kajian daya dukung dan daya tampung wilayah agar pembangunan berkelanjutan dari aspek lingkungan hidup dapat direalisasikan dengan baik oleh masing-masing daerah.

Aspek dalam pembangunan berkelanjutan tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan hidup namun juga aspek sosial, ekonomi, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Aspek tersebut dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan dapat diukur dalam indikator-indikator capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Pencapaian TPB diimplementasikan berupa kebijakan, rencana, dan/atau program dalam RPJPD agar rencana aksi TPB menjadi terukur dan jelas dalam periode waktu tertentu. Kota

Balikpapan juga disiapkan sebagai Buffer Zone (Zona Penyangga) bagi IKN baru yaitu di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara karena berbatasan secara langsung. Sehingga dengan disusunnya RTRW dan KLHS Kota Balikpapan diharapkan dapat menjadi instrumen penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan, mengoptimalkan tata ruang dan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi seyogyanya dapat berjalan sejalan dengan daya dukung ekosistem untuk menjamin keberlanjutan jangka Panjang.

**Tabel 3.1**

**Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah**

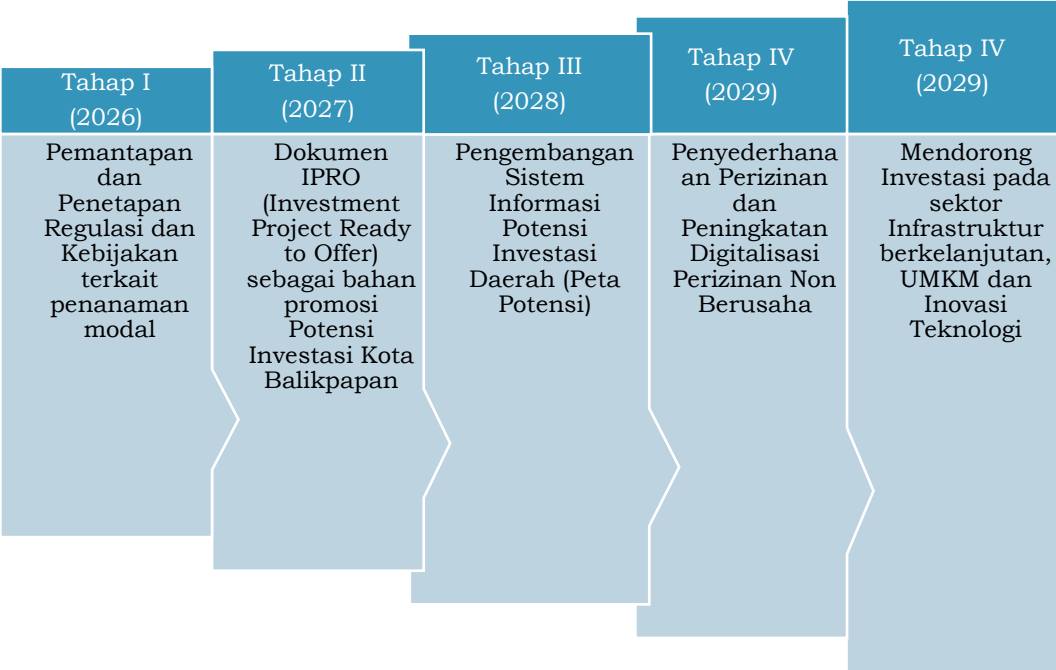
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>										
Meningkatnya Produktifitas Perekonomian Daerah yang Merata dan Berkelanjutan	Meningkatnya Nilai Realisasi Penanaman Modal		Nilai Realisasi Penanaman Modal (triliun rupiah)	22	22,11	22,28	22,5	22,78	23,12	
		Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Publik Non Perizinan Berusaha yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Layanan Investasi dan Perizinan (%)	15,21	20,21	25,21	30,21	35,21	40,21	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (poin)	95,52	95,54	95,58	95,62	95,66	96,2	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	77,62	77,7	77,8	77,9	78	78,1	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

3.2.1 Strategi Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan. Penahapan merupakan prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan.

Gambar 3.2  
Penahapan Pembangunan DPMPTSP Kota Balikpapan 2025-2029



Tahapan Pembangunan DPMPTSP Kota Balikpapan memiliki tema Pembangunan setiap tahunnya yang diselaraskan dengan Tema Pembangunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

3.2.2 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas, prinsip, atau pedoman yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program atau kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya dalam konteks pembangunan atau organisasi. Arah kebijakan ini menjadi panduan dalam merumuskan strategi dan rencana aksi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pada penyusunan arah kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan pada pirnsipnya mengacu pada operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD Kota Balikpapan serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan.

**Tabel 3.2**  
**Teknis Merumuskan Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP Kota Balikpapan**

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pembangunan dan pengembangan daerah mitra IKN untuk mendukung superhub ekonomi IKN	Pemutakhiran data potensi dan peluang investasi sebagai sumber data sektor ekonomi potensial	
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja		Mendorong Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Pengembangan destinasi wisata potensial	Memaksimalkan media promosi dan ketersediaan informasi terkait peluang investasi	
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga	Pemanfaatan Sistem dan aplikasi Perizinan dan Non Perizinan yang mendukung kemudahan berusaha	
		Optimalisasi akses terhadap informasi perizinan dan non perizinan yang dapat diakses melalui PPID	
Peraturan Walikota Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2024	Peningkatan partisipasi bermakna dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	Optimalisasi fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha	

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif**

Rencana program prioritas selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan jangka menengah DPMPTSP yang telah ditetapkan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Balikpapan tahun 2025-2029 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah meliputi:

**Tabel 4.1**

**Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra DPMPTSP Kota Balikpapan**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>							
- Meningkatnya produktifitas perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya Nilai Realisasi Penanaman Modal				Nilai Realisasi Penanaman Modal (triliun rupiah)		
		Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Pelayanan Perizinan dan Pelayanan			Persentase Peningkatan Layanan Investasi dan Perizinan (%)		
					Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan (Indeks)		
					Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi		Tersusunnya Regulasi Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
					Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	
				Tersusunnya Peta Potensi Investasi Daerah	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		Persentase investor potensial (%)	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
				Terlaksananya Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Terlaksananya Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Elektronik (Pelaku Usaha)		
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
				Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha Penanaman Modalnya (%)	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
				Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
				Terlaksananya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.18.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.18.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	



Tabel 4.2

Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				18.749.639.000		19.312.128.000		20.277.734.000		20.683.289.000		21.303.788.000
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15.843.690.311		16.621.126.711		16.873.528.818		17.366.043.797		17.832.484.755
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	94,32	94,57	15.843.690.311	94,82	16.621.126.711	95,07	16.873.528.818	95,32	17.366.043.797	95,57	17.832.484.755
2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		0		0		0
Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0
2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		0		0		0
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.287.036.000		10.287.036.000		10.287.036.000		10.492.776.720		10.702.632.254
Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71	71	10.287.036.000	77	10.287.036.000	77	10.287.036.000	77	10.492.776.720	77	10.702.632.254
2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.287.036.000		10.287.036.000		10.287.036.000		10.492.776.720		10.702.632.254
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71	71	10.287.036.000	77	10.287.036.000	77	10.287.036.000	77	10.492.776.720	77	10.702.632.254
2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		736.507.082		765.671.287		937.229.009		1.011.345.879
Terwujudnya profesionalisme aparatur perangkat daerah.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	0	0	1	736.507.082	1	765.671.287	1	937.229.009	1	1.011.345.879
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	71	0		78		78		78		78	
2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		100.000.000		105.000.000		107.100.000		110.313.000
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	0	0	1	100.000.000	1	105.000.000	1	107.100.000	1	110.313.000
2.18.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0		636.507.082		660.671.287		830.129.009		901.032.879
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	71	0	0	78	636.507.082	78	660.671.287	78	830.129.009	78	901.032.879

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.435.822.687		1.385.822.687		1.436.662.856		1.464.196.219		1.512.509.518
Terwujudnya layanan umum perkantoran perangkat daerah.	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	1.435.822.687	1	1.385.822.687	1	1.436.662.856	1	1.464.196.219	1	1.512.509.518
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55	55		55		55		55		55	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	3		3		3		3		3	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	3		3		3		3		3	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	3		3		3		3		3	
2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				59.994.690		59.994.690		62.994.425		64.254.313		66.181.942
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	59.994.690	1	59.994.690	1	62.994.425	1	64.254.313	1	66.181.942

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				76.408.953		76.408.953		80.229.400		81.833.988		84.289.008
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	3	76.408.953	3	76.408.953	3	80.229.400	3	81.833.988	3	84.289.008
2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				553.999.755		503.999.755		529.199.743		539.783.738		555.977.250
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	3	553.999.755	3	503.999.755	3	529.199.743	3	539.783.738	3	555.977.250
2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				99.995.270		99.995.270		104.995.034		107.094.934		110.307.782
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	99.995.270	3	99.995.270	3	104.995.034	3	107.094.934	3	110.307.782
2.18.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				80.383.000		80.383.000		84.402.150		86.090.193		88.672.900
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	80.383.000	1	80.383.000	1	84.402.150	1	86.090.193	1	88.672.900

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				565.041.019		515.041.019		522.342.104		531.589.053		551.924.136
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55	55	565.041.019	55	515.041.019	55	522.342.104	55	531.589.053	55	551.924.136
2.18.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		50.000.000		52.500.000		53.550.000		55.156.500
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0	1	50.000.000	1	52.500.000	1	53.550.000	1	55.156.500
2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				249.600.000		299.600.000		314.580.000		320.871.600		330.497.748
Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	2	249.600.000	2	299.600.000	2	314.580.000	2	320.871.600	2	330.497.748
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0		1		1		1		1	
2.18.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				249.600.000		249.600.000		262.080.000		267.321.600		275.341.248
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	2	249.600.000	2	249.600.000	2	262.080.000	2	267.321.600	2	275.341.248

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		50.000.000		52.500.000		53.550.000		55.156.500
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	1	50.000.000	1	52.500.000	1	53.550.000	1	55.156.500
2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.523.586.360		2.564.515.678		2.654.551.148		2.707.642.171		2.788.871.436
Terwujudnya operasional umum perangkat daerah.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	2.523.586.360	1	2.564.515.678	1	2.654.551.148	1	2.707.642.171	1	2.788.871.436
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3		3		3		3		3	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	6		6		6		6		6	
2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.250.000		5.355.000		5.515.650
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.250.000	1	5.355.000	1	5.515.650
2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				650.000.000		650.000.000		682.500.000		696.150.000		717.034.500
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	650.000.000	3	650.000.000	3	682.500.000	3	696.150.000	3	717.034.500
2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.868.586.360		1.909.515.678		1.966.801.148		2.006.137.171		2.066.321.286
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	6	1.868.586.360	6	1.909.515.678	6	1.966.801.148	6	2.006.137.171	6	2.066.321.286

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.347.645.264		1.347.645.264		1.415.027.527		1.443.328.078		1.486.627.920
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar berfungsi optimal.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24	28	1.347.645.264	28	1.347.645.264	28	1.415.027.527	28	1.443.328.078	28	1.486.627.920
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	87	94		94		94		94		94	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1		1		1		1		1	
2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				822.677.164		822.677.164		863.811.022		881.087.243		907.519.860
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24	28	822.677.164	28	822.677.164	28	863.811.022	28	881.087.243	28	907.519.860
2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				364.968.100		364.968.100		383.216.505		390.880.835		402.607.260
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	87	94	364.968.100	94	364.968.100	94	383.216.505	94	390.880.835	94	402.607.260
2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				160.000.000		160.000.000		168.000.000		171.360.000		176.500.800
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	160.000.000	1	160.000.000	1	168.000.000	1	171.360.000	1	176.500.800

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT  (1)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT  (2)	BASELINE TAHUN 2024  (3)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				215.000.000		465.000.000		515.023.443		854.873.069		935.059.946
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	128	100	215.000.000	100	465.000.000	100	515.023.443	100	854.873.069	100	935.059.946
2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				0		50.000.000		52.500.000		103.550.000		55.156.500
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya terkait Perizinan Berusaha Berdasarkan Resiko	0	0	0	1	50.000.000	1	52.500.000	1	103.550.000	1	55.156.500
	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	12	0		15		15		15		15	
	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	0		0		0		1		0	
2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				0		0		0		50.000.000		0
Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000	0	0
2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota				0		25.000.000		26.250.000		26.775.000		27.578.250
Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	12	0	0	15	25.000.000	15	26.250.000	15	26.775.000	15	27.578.250



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				0		25.000.000		26.250.000		26.775.000		27.578.250
Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	0	0	0	1	25.000.000	1	26.250.000	1	26.775.000	1	27.578.250
2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				215.000.000		415.000.000		462.523.443		751.323.069		879.903.446
Terbitnya dokumen peta potensi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	1	215.000.000	1	415.000.000	1	462.523.443	1	751.323.069	1	879.903.446
	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4	1		1		1		1		1	
2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				140.000.000		140.000.000		147.000.000		149.940.000		154.438.200
Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	1	140.000.000	1	140.000.000	1	147.000.000	1	149.940.000	1	154.438.200
2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				75.000.000		275.000.000		315.523.443		601.383.069		725.465.246
Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	1	75.000.000	1	275.000.000	1	315.523.443	1	601.383.069	1	725.465.246

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				912.392.310		912.392.310		1.512.392.310		932.140.156		960.104.361
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Investor Potensial	8,3	25	912.392.310	33,3	912.392.310	35	1.512.392.310	37,03	932.140.156	37,8	960.104.361
2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				912.392.310		912.392.310		1.512.392.310		932.140.156		960.104.361
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5	5	912.392.310	5	912.392.310	5	1.512.392.310	5	932.140.156	5	960.104.361
	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1	0		1		1		1		1	
2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				912.392.310		862.392.310		1.462.392.310		879.640.156		906.029.361
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5	5	912.392.310	5	862.392.310	5	1.462.392.310	5	879.640.156	5	906.029.361
2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				0		50.000.000		50.000.000		52.500.000		54.075.000
Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	52.500.000	1	54.075.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				1.011.450.379		508.147.679		531.055.063		543.176.164		559.471.449
Meningkatnya Perizinan Berusaha Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	97,72	97,82	1.011.450.379	97,92	508.147.679	98,02	531.055.063	98,12	543.176.164	98,22	559.471.449
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				1.011.450.379		508.147.679		531.055.063		543.176.164		559.471.449
Terlaksananya Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	13.088	13.153	1.011.450.379	13.219	508.147.679	13.285	531.055.063	13.352	543.176.164	13.418	559.471.449
	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	13.678	8.000		7.000		60.000		5.000		4.000	
	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	176	110		121		133		146		161	
	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0		5		5		5		5	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				0		50.000.000		50.000.000		52.500.000		54.075.000
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	5	50.000.000	5	50.000.000	5	52.500.000	5	54.075.000
2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				753.302.700		200.000.000		210.000.000		214.200.000		220.626.000
Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	13.088	13.153	753.302.700	13.219	200.000.000	13.285	210.000.000	13.352	214.200.000	13.418	220.626.000
2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko				106.198.727		106.198.727		111.508.663		113.738.837		117.151.002
Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	13.678	8.000	106.198.727	7.000	106.198.727	60.000	111.508.663	5.000	113.738.837	4.000	117.151.002
2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko				151.948.952		151.948.952		159.546.400		162.737.327		167.619.447
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	176	110	151.948.952	121	151.948.952	133	159.546.400	146	162.737.327	161	167.619.447

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				343.303.000		360.468.150		378.491.558		510.468.150		525.782.195
Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha Penanaman Modalnya	100	100	343.303.000	100	360.468.150	100	378.491.558	100	510.468.150	100	525.782.195
2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				343.303.000		360.468.150		378.491.558		510.468.150		525.782.195
Terlaksananya Penyampaian LKPM	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	560	150	343.303.000	150	360.468.150	150	378.491.558	150	510.468.150	150	525.782.195
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	38	16		18		20		22		24	
	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	20	4		5		6		7		8	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				110.248.000		115.760.400		121.548.420		165.760.400		170.733.212
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	20	4	110.248.000	5	115.760.400	6	121.548.420	7	165.760.400	8	170.733.212
2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				153.500.000		161.175.000		169.233.750		211.175.000		217.510.250
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	560	150	153.500.000	150	161.175.000	150	169.233.750	150	211.175.000	150	217.510.250
2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal				79.555.000		83.532.750		87.709.388		133.532.750		137.538.733
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	38	16	79.555.000	18	83.532.750	20	87.709.388	22	133.532.750	24	137.538.733

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				423.803.000		444.993.150		467.242.808		476.587.664		490.885.294
Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100	100	423.803.000	100	444.993.150	100	467.242.808	100	476.587.664	100	490.885.294
2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				423.803.000		444.993.150		467.242.808		476.587.664		490.885.294
Terlaksananya Permintaan Data dan informasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	1	423.803.000	1	444.993.150	1	467.242.808	1	476.587.664	1	490.885.294
2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				423.803.000		444.993.150		467.242.808		476.587.664		490.885.294
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	1	423.803.000	1	444.993.150	1	467.242.808	1	476.587.664	1	490.885.294

**Tabel 4.3**

**Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>				
1.	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
			2.18.02.2.01.0003 - Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	
			2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
2.	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
			2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
			2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
			2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
			2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
4.	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
			2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	
5.	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kota Balikpapan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
2.	Nilai Realisasi Penanaman Modal	triliun rupiah	20	22	22,11	22,28	22,5	22,78	23,12	
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,32	77,62	77,7	77,8	77,9	78	78,1	
4.	Persentase Peningkatan Layanan Investasi dan Perizinan	%	10,21	15,21	20,21	25,21	30,21	35,21	40,21	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan	Indeks	95,5	95,52	95,54	95,58	95,62	95,66	96,2	

**Tabel 4.5**

## Indikator Kinerja kunci DPMPSTSP Kota Balikpapan

[illegible]

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Program
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	94,32	94,4	94,57	94,82	95,07	95,32	95,57	Indikator Program
9	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	128	100	100	100	100	100	100	Indikator Program
10	Persentase investor potensial	%	8,3	15,38	25	33,3	35	37,03	37,8	Indikator Program
11	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	6,55	10	0,5	0,75	1	1,25	1,5	Indikator LPPD

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan tahun 2025-2029 merupakan rencana pembangunan selama 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan. Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif. Renstra dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Balikpapan dalam kurun waktu lima tahun.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan Perubahan Renstra DPMPTSP Kota Balikpapan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh unit dan jabatan pada DPMPTSP Kota Balikpapan agar mendukung pencapaian target-target Renstra tahun 2025-2029, dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra DPMPTSP dengan sebaik-baiknya;
2. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Perubahan Renstra DPMPTSP Kota Balikpapan tahun 2025-2029;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Perubahan Renstra DPMPTSP Kota Balikpapan tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

## Q. DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Balikpapan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Renstra ini berfungsi sebagai pedoman utama bagi Disporapar Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan pembangunan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepariwisataan di Kota Balikpapan. Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, yang bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya.

Penyusunan Renstra Disporapar Kota Balikpapan tahun 2025-2029 merupakan amanat regulasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi jembatan antara visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2025-2029, dengan arah kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Disporapar. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), dan Renstra provinsi/kabupaten/kota lainnya sangat penting untuk menciptakan sinergi pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, Renstra ini juga menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya, memastikan bahwa setiap aktivitas yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Disporapar memiliki landasan yang kuat dan terarah. Melalui Renstra ini, Disporapar berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, serta pengembangan potensi pariwisata sebagai salah satu pilar ekonomi Kota Balikpapan.

#### 1.2.Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Balikpapan tahun 2025-2029 ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi kaidah penyusunan produk hukum. Landasan hukum ini mencakup ketentuan yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangan Perangkat Daerah, di samping pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Adapun dasar hukum yang melandasi penyusunan Renstra ini adalah:

1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang RI Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Startegis Daerah Perangkat Daerah;
9. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 26a/M.PPN/HK/05/2025 Tentang Kode Referensi Indikator Pembangunan;
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2025-2029

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Disporapar Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis yang komprehensif, memberikan arah dan pedoman bagi seluruh jajaran Disporapar Kota Balikpapan dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Pelayanan publik di Bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata untuk periode lima tahun kedepan.

Adapun Tujuan dari Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Disporapar ini adalah:

1. Merumuskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Disporapar Kota Balikpapan untuk periode 2025-2029
2. Menyediakan Kerangka Acuan yang jelas bagi seluruh Program dan Kegiatan yang diampu oleh Disporapar Kota Balikpapan agar selaras dan Konsisten dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Balikpapan
3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dan akuntabilitas kinerja Disporapar kota Balikpapan dalam mencapai target Pembangunan Daerah
4. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya yang Dimiliki oleh Disporapar Kota Balikpapan dalam Penyelenggaraan pelayanan di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepariwisata

### 1.4. **Sistematika Penulisan**

Untuk menjamin keterbacaan, kelengkapan, dan kemudahan pemahaman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pembangunan daerah dalam membaca Dokumen Renstra ini. Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Balikpapan periode tahun 2025-2029 disusun berdasarkan sistematika penulisan yang terstruktur dan komprehensif.

Sub-bab ini secara spesifik akan menguraikan pokok-pokok bahasan yang termuat dalam setiap bab, serta menjabarkan susunan garis besar isi dokumen secara keseluruhan. Dengan penyajian yang sistematis ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh dan terintegrasi mengenai alur pemikiran, ruang lingkup, dan kedalaman informasi yang disajikan dalam Renstra ini, mulai dari latar belakang dan landasan hukum yang mendasari, hingga penetapan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta rencana program,

kegiatan, dan indikator kinerja yang menjadi target pencapaian Disporapar Kota Balikpapan selama lima tahun ke depan. Berikut merupakan sistematika Penulisan pada dokumen Rencana Strategis Disporapar Kota Balikpapan Tahun 2025-2029:

#### Bab I Pendahuluan

1. Latarbelakang
2. Dasar Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

#### Bab II Gambar Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - a. Tugas,Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
  - b. Sumber Daya Perangkat Daerah
  - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 5 tahun (2020-2024)
  - d. Kelompok Sasaran Layanan
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
  - b. Isu Strategis

#### Bab III Tujuan,Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra
4. Arah Kebijakan Renstra

#### Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

1. Uraian Program
2. Uraian Kegiatan
3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja,indicator,target dan pagu indikatif
4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025-2029
6. Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) 2025-2029

#### Bab V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian, dan eveluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA BALIKPAPAN

#### **2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Disporapar Kota Balikpapan**

Tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Balikpapan diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022. Secara spesifik, mandat utama Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Balikpapan yaitu ***“Menyelenggarakan urusan bidang pemuda, olah raga dan pariwisata serta tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku”***

Sedangkan tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Balikpapan menurut Perwali Nomor 1 Tahun 2022 adalah:

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan ;
- b. Mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Serta melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Penyusunan program dan kegiatan di bidang kepemudaan, olahraga, Pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah;
- d. Pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama di bidang kepemudaan, Olahraga dan pariwisata;
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan/atau pengelolaan Pariwisata;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- g. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan perizinan/non perizinan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- h. Pelaksanaan analisa dan pemberian saran teknis
- i. Perizinan/non perizinan bidang kepemudaan, olahraga dan Pariwisata;
- j. Pelaksanaan pemberian hibah;
- k. Pembinaan dan pengendalian UPTD; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan yang telah diatur oleh Peraturan Walikota No 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

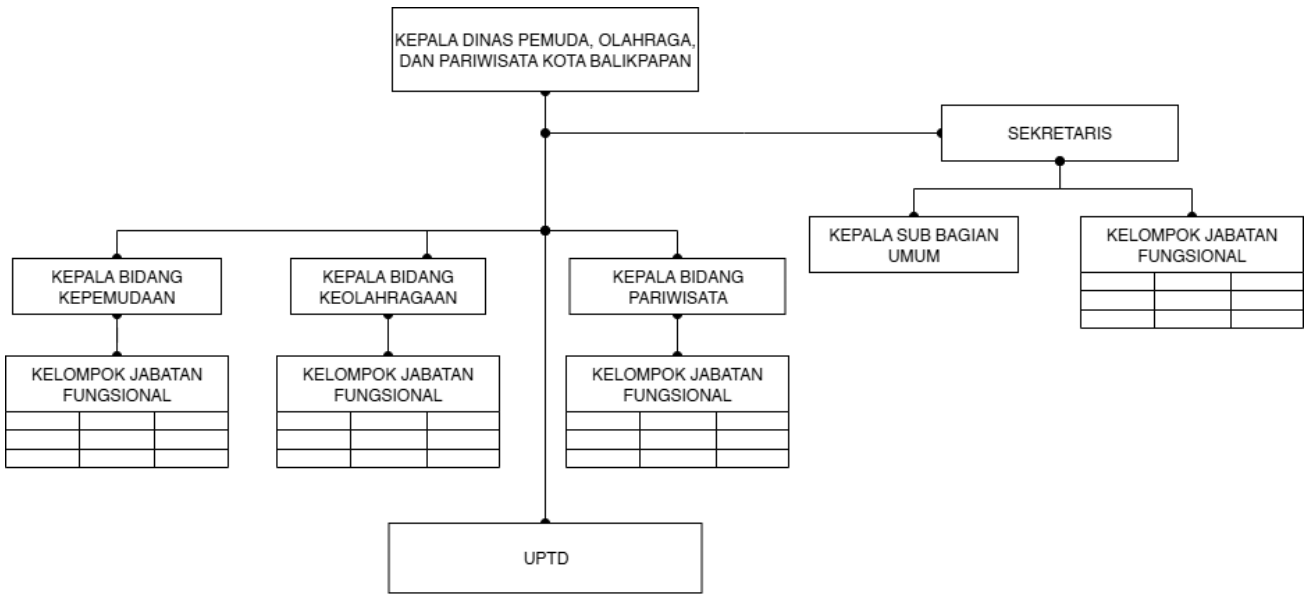
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan sub koordinator, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, yaitu:

- a. Sub Bagian Umum
- b. Substansi Program dan Keuangan
3. Bidang Kepemudaan  
Bidang Kepemudaan mempunyai tugas mengatur, mengelola, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Bidang Kepemudaan.  
Pengelompokan substansi Bidang Kepemudaan menyelenggarakan uraian tugas yang terdiri atas:
  - a. Substansi Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda,
  - b. Substansi Kewirausahaan Pemuda,
  - c. Substansi Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan,
4. Bidang Keolahragaan  
Bidang Keolahragaan memiliki tugas mengatur, mengelola, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Bidang Keolahragaan.  
Pengelompokan substansi Bidang Keolahragaan menyelenggarakan uraian tugas yang terdiri atas:
  - a. Substansi Pembinaan Olahraga Prestasi,
  - b. Substansi Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Masyarakat
  - c. Substansi Pengembangan Industri dan Sarana Prasarana Olahraga,
5. Bidang Pariwisata  
Bidang Pariwisata mempunyai tugas mengatur, mengelola, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan.  
Pengelompokan substansi Bidang Pariwisata terdiri atas:
  - a. Substansi Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata,
  - b. Substansi Pengembangan Destinasi Pariwisata,
  - c. Substansi Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata,
6. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)  
Unit Pelaksanaan Teknis adalah unsur pelaksana operasional teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas. Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis, uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan diatur tersendiri dalam peraturan walikota.
7. Kelompok Jabatan Fungsional  
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri. Terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Balikpapan



Sumber: Perwali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022

2.1.2. Sumber Daya

a. Jumlah Pegawai yang menduduki jabatan dan staf

No	Jabatan/Staf	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Esselon II	1	
2.	Esselon III	4	
3.	Esselon IV	2	
4.	Staf PNS	27	
5.	PPPK	29	
	Jumlah	63	

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan

No	Jabatan/Staf	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	IV	5	
2.	III	24	
3.	II	5	
4.	PPPK	29	
	Total	63	

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Magister (S-2)	4

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
2.	Sarjana (S-1/D-IV)	14
3.	Sarjana Muda (D3)	4
4.	SMA / SLTA	38
	<b>Total</b>	<b>63</b>

d. Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1.	PNS	20	14	34
2.	PPPK	16	13	29
	<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>27</b>	<b>63</b>

e. Sarana dan Prasarana

No	Nama Sarana Prasarana	Jumlah/Unit	Kondisi
1.	Gedung Kantor	1	Baik
2.	Gedung Olahraga	1	Baik
3.	Kendaraan Dinas Roda 2	5	Baik
4.	Kendaraan Dinas Roda 4	11	Baik
5.	Kendaraan Dinas Roda 3	2	Baik
6.	Kendaraan Dinas Roda 6	1	Baik
7.	Bus Pariwisata	1	Baik
	<b>Total</b>	<b>22</b>	

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 5 (lima tahun)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target PNS	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat					Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Daya Saing Kepemu daan				0,021	0,089	0,082			0,064	0,079	0,209			304,76	88,76	254,88	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
	dan Keolahra- gaan																		
2	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi, kepe- mu- daan dan organisasi social kemasy- arakatan				12%	15%	20%	25%							0,00	0,00	0,00		
	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri						15%					0,83%							
3	Peningkatan prestasi olahraga				15.96%	20.96%	25.96%	30.96%							#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		
	Persentase Atlit yang memperoleh medali dalam berbagai event kejuaraan olahraga						20,96%					20,77%							
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				28.75	30.5	32.25	34							#VALUE!	0,00	#VALUE!		
5	Nilai SAKIP Dinas Pemuda ,Olahraga dan						72,00					71,07			#DIV/0!	#DIV/0!	98,71		

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat					Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025
	Pariwisata Kota Balikpapan																	
6	Angka kunjungan wisatawan				1.440.000	1.900.000	2.700.000	3.400.000		1.729.000	2.558.000	2.670.000		120,07	134,63	98,89		
7	Tingkat Hunian akomodasi						45%	53%				53,54%		#DIV/0!	#DIV/0!	118,98		
8	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif				2,20%	30%	35,20%			28,46	33,53	38,57		129363,64	11176,67	10957,39		
9	Persentase pelaku ekraf yang tersertifikasi						34,62%					34,68%		#DIV/0!	#DIV/0!	100,17		

#### 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata. Penentuan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat menjangkau target yang tepat, sehingga berdampak signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis.

Bidang	Kelompok Sasaran	Keterangan
Bidang Kepemudaan	Pemuda dan Pelajar	Individu berusia 16-30 tahun yang menjadi target utama program pengembangan kapasitas, kewirausahaan, dan kepemimpinan.
	Forum Organisasi Kepemudaan (FKP)	Organisasi yang berbadan hukum, menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan program kepemudaan.

Bidang	Kelompok Sasaran	Keterangan
	Komunitas Pemuda	Kelompok-kelompok pemuda non-formal yang memiliki minat atau kegiatan tertentu (contoh: komunitas kreatif, sosial, atau lingkungan).
Bidang Keolahragaan	Atlet dan Pelatih	Individu atau tim berprestasi dan berpotensi dalam berbagai cabang olahraga.
	Masyarakat Umum	Seluruh lapisan masyarakat yang terlibat dalam olahraga rekreasi atau memiliki kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat.
	Induk Cabang Olahraga (Cabor)	Organisasi olahraga resmi yang menjadi mitra dalam pembinaan dan penyelenggaraan event olahraga
Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	Pelaku Usaha Pariwisata	Individu atau entitas bisnis di sektor pariwisata
	Pelaku Ekonomi Kreatif	Individu atau kelompok yang bergerak di industri kreatif
	Masyarakat Destinasi Wisata	Warga lokal yang berperan penting dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas.
	Wisatawan	Wisatawan domestik dan mancanegara sebagai konsumen utama produk dan jasa pariwisata.

**2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan**

Subab ini memuat dan memaparkan permasalahan dan isu strategis krusial yang perlu ditangani oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan. Pemahaman atas entitas ini menjadi landasan primer dalam perumusan tujuan dan sasaran strategis Dinas

Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Balikpapan diantaranya sebagai berikut:

**2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Urusan Kepemudaan			
1.	Kurangnya fasilitasi pemuda berwirausaha	Minimnya minat pemuda berwirausaha	1. Tidak Percaya Diri dan Takut Gagal,
			2. Kurangnya Pendidikan dan Literasi Kewirausahaan,
			3. Keterbatasan Modal Usaha dan pemasaran produk
2.	Kurangnya minat pemuda mengikuti kegiatan kepeloporan	Rendahnya keterlibatan pemuda dalam kegiatan kemasyarakatan dan Kurangnya kepeloporan pemuda di Kota Balikpapan	1. Kurangnya kaderisasi pemuda inspiratif
			2. Kurangnya dukungan keluarga dan lingkungan ,
			3. Budaya takut gagal dan enggan mengambil tanggung jawab,
			4. terbatasnya sarana dan prasarana ruang kreatif pemuda
3.	Minimnya Regenerasi Kepemimpinan	Kurangnya kaderisasi dan pembinaan anggota muda untuk menjadi pemimpin selanjutnya	1. Pengurus organisasi sering diisi oleh orang yang sama atau terlalu lama menjabat.
4.	Data organisasi kepemudaan tidak valid	Kelengkapan administrasi organisasi tidak lengkap	1. Kendala biaya pengelolaan akte pendirian yang mahal



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
5.	Partisipasi Anggota Organisasi Perempuan Rendah	Kurangnya kepercayaan kepemimpinan perempuan	1.	Kurang dukungan orangtua/keluarga,
			2.	Aktivitas diluar/outdoor tidak disukai pemuda perempuan karena merusak penampilan
6.	Sarana Prasarana untuk kegiatan pemuda disabilitas	Belum ada yang memfasilitasi sarana prasarana untuk kegiatan pemuda disabilitas	1.	Masih ada anggapan bahwa pemuda disabilitas kurang mampu atau tidak perlu difasilitasi secara khusus.,
			2.	Tidak tersedia alokasi khusus dalam APBD atau dana hibah pemuda.
	Urusan Keolahragaan			
1.	SDM keolahragaan	Belum adanya tenaga S2 keolahragaan , Lisensi SDM Kepelatihan/Perwasitan masih minim	1.	Kurangnya dukungan anggaran pemerintah dan dukungan dana CSR dan
			2.	belum adanya fakultas keolahragaan di Perguruan Tinggi Negeri
			3.	kurangnya perhatian pemerintah dalam memfasilitasi peningkatan SDM keolahragaan
2.	Tindak Lanjut hasil kajian Desain Olahraga Daerah (DOD) dan kajian Pusat Pendidikan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD)	Pemerintah Kota belum menindaklanjuti hasil kajian Desain Olahraga Daerah (DOD) dan PPLPD	1.	Belum tersedia sarana dan prasarana cabang olahraga DOD (Desain Olahraga Daerah) seperti

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
				atletik dan renang dan PPLPD
3.	Sarana dan prasarana olahraga	Kurangnya Infrastuktur prasarana dan sarana untuk memfasilitasi kegiatan cabang olahraga prestasi, rekreasi dan disabilitas	1.	Terbatasnya lahan aset daerah untuk pembangunan Infrastuktur prasarana dan sarana olahraga prestasi, rekreasi dan disabilitas
			2.	Minimnya anggaran yang diberikan untuk pembangunan dan pemeliharaan Infrastuktur prasarana dan sarana olahraga prestasi, rekreasi dan disabilitas
4.		Belum terbentuknya UPTD Gedung Olahraga	1.	Masih adanya pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang merupakan aset Pemerintah Kota Balikpapan namun dikelola oleh OPD lain selain DPOP (Seperti stadion batakan, Lapangan SMPN 18, gedung Squash, Lapangan Foni, Lapangan Gunung Bahagia, Balikpapan Sport dan Convention Center (Dome), dan sebagainya)
5.	Indeks Pembangunan Olahraga	IPO Belum diterapkan ke seluruh kecamatan di Kota Balikpapan	1.	Kurangnya sosialisasi ke masyarakat dan belum ada alokasi anggaran yang mendukung kegiatan IPO
	<b>Urusan Pariwisata</b>			

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
1.	Pemasaran Pariwisata	Tidak adanya analisa pasar wisatawan kota Balikpapan		Motivasi kunjungan wisatawan erat kaitannya dengan objek wisata, event pariwisata dan MICE maka dari itu perlu dilakukan analisa pasar pariwisata bagaimana yang dapat dikembangkan di Kota Balikpapan.
2.	Promosi Digital Belum Terintegrasi dan Konsisten	Aktivitas promosi masih tersebar, tidak satu narasi, dan kurang memanfaatkan platform digital secara optimal.		Koordinasi Antar Stakeholder Belum Solid, belum adanya data analisa pasar,
3.	Keterbatasan lahan destinasi wisata yang dikelola yang merupakan aset Pemerintah Kota Balikpapan	Pemanfaatan lahan Pantai Manggar Segara Sari untuk sarana dan prasarana sudah terpenuhi		Destinasi wisata yang merupakan aset Pemkot hanya Pantai Manggar Segara Sari sehingga pembangunan sarana prasarana hanya dapat dilaksanakan di kawasan pantai manggar segara sari
4.	Kualitas Daya Tarik dan destinasi wisata	Belum optimalnya pengelolaan destinasi		Belum adanya standar kualitas SDM pengelola destinasi wisata
				Kurangnya data riset pariwisata kota Balikpapan
5.	Sumber Daya Manusia Pariwisata dan ekonomi kreatif	Kualitas SDM pariwisata dan ekraf belum berdaya saing		Belum tersertifikasi seluruh pelaku pariwisata dan pelaku ekraf
6.	Sarana dan Prasarana	Perlunya pemeliharaan dan peningkatan		Kondisi sarana prasarana atau

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
	pendukung operasional UPTD PMSS	sarana penunjang seperti tempat ibadah , kamar mandi/toilet, kedai, gazebo dan lamin, wisma, gapura, pos kesehatan, ruang informasi, ruang penyimpanan/gudang, dan lain-lain		aset berada di kawasan pantai sehingga mudah mengalami korosi/berkarat maka diperlukan pemeliharaan secara berkala untuk menjaga kondisi aset dapat digunakan sesuai fungsinya dengan baik
7.	Peningkatan sistem pelayanan retribusi manual menjadi digital/elektronifikasi	Perubahan sistem manual menjadi elektronifikasi		efisiensi anggaran belanja cetak dan ATK
8.	Pengelolaan sampah di kawasan pantai manggar segara sari	Terbatasnya sarana pengelolaan sampah		Perlunya sarana dan prasarana pengelolaan sampah di pantai manggar
9.	Abrasi Wisata Pantai Manggar Segara Sari	Belum maksimalnya pembangunan pemecah ombak di kawasan pantai manggar		Belum adanya pemecah ombak di area timur dan barat
10 .	Atraksi wisata di pantai manggar	Perlunya atraksi wisata dipantai manggar untuk menarik minat pengunjung sehingga kegiatan di pantai tidak monoton		Kurangnya atraksi wisata di pantai manggar
11 .	Asuransi Kecelakaan di Tempat Wisata	Tidak adanya asuransi kecelakaan di tempat wisata pantai manggar, dasarnya UU pariwisata Nomor 10 tahun 2009		Asuransi kecelakaan di tempat wisata pantai manggar, dasarnya UU Pariwisata Nomor 10 tahun 2009 belum ada

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
				Peraturan Daerah yang mengatur

2.2.2. Isu Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota  
Balikpapan

Tabel 2. 1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Potensi yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			ISU Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;	Belum adanya tenaga S2 keolahragaan , Lisensi SDM Kepelatihan/Perawatan masih minim	Kesehatan, kesejahteraan, pendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender	Globalisasi tenaga kerja	Peningkatan kualitas SDM	1.Link & match pendidikan-DUDI, 2. Kualitas SDM lokal	SDM keolahragaan
Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;	Pemerintah Kota belum menindaklanjuti hasil kajian Desain Olahraga Daerah (DOD) dan PPLPD	Kesehatan, kesejahteraan, pendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender	Globalisasi tenaga kerja	Peningkatan kualitas SDM	1.Link & match pendidikan-DUDI, 2. Kualitas SDM lokal	Tindak Lanjut hasil kajian Desain Olahraga Daerah (DOD) dan kajian Pusat Pendidikan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD)
Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;	Kurangnya Infrastruktur prasarana dan sarana untuk memfasilitasi kegiatan cabang olahraga prestasi,rekreasi dan disabilitas	Kesehatan, kesejahteraan, pendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender	Globalisasi tenaga kerja	Peningkatan kualitas SDM	1.Link & match pendidikan-DUDI, 2. Kualitas SDM lokal	Sarana dan prasarana olahraga
Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;	Belum terbentuknya UPTD Gedung Olahraga	Kesehatan, kesejahteraan, pendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender	Globalisasi tenaga kerja	Peningkatan kualitas SDM	1.Link & match pendidikan-DUDI, 2. Kualitas SDM lokal	Sarana dan prasarana olahraga

Potensi yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			ISU Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;	IPO Belum diterapkan ke seluruh kecamatan di Kota Balikpapan	Kesehatan, kesejahteraan, pendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender	Globalisasi tenaga kerja	Peningkatan kualitas SDM	1.Link & match pendidikan-DUDI, 2. Kualitas SDM lokal	Indeks Pembangunan Olahraga
Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;	Perlunya pemeliharaan dan peningkatan sarana penunjang seperti tempat ibadah , kamar mandi/toilet, kedai, gazebo dan lamin, wisma, gapura, pos kesehatan, ruang informasi, ruang penyimpanan/gudang, dan lain-lain	Perwujudan kota dan permukiman berkelanjutan (air bersih, sanitasi, dll)	Urbanisasi masyarakat dunia	Penguatan infrastruktur	Pemenuhan SPM	Sarana dan Prasarana pendukung operasional UPTD PMSS
		Penanganan dampak pemindahan IKN		Pengembangan wilayah Pembangunan IKN, Superhub Ekonomi IKN, dan Mitra IKN	Konektivitas wilayah Minimnya pusat pertumbuhan	
Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;	Perubahan sistem manual menjadi elektronifikasi	Industri, inovasi, dan infrastruktur	Perkembangan teknologi	Ketahanan Ekonomi	1.Diversifikasi ekonomi, 2.Pengembangan Industri	Peningkatan sistem pelayanan retribusi manual menjadi digital/elektronifikasi

Potensi yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			ISU Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
		Penanganan dampak pemindahan IKN				
Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;	Terbatasnya sarana pengelolaan sampah	Perwujudan kota dan permukiman berkelanjutan (air bersih, sanitasi, dll)	Urbanisasi masyarakat dunia	Penguatan infrastruktur	Pemenuhan SPM	Pengelolaan sampah di kawasan pantai manggar segara sari
		Penanganan dampak pemindahan IKN		Pengembangan wilayah Pembangunan IKN, Superhub Ekonomi IKN, dan Mitra IKN	Konektivitas wilayah Minimnya pusat pertumbuhan	
Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;	Belum maksimalnya pembangunan pemecah ombak di kawasan pantai manggar	Perwujudan kota dan permukiman berkelanjutan (air bersih, sanitasi, dll)	Urbanisasi masyarakat dunia	Penguatan infrastruktur	Pemenuhan SPM	Abrasi Wisata Pantai Manggar Segara Sari
		Penanganan dampak pemindahan IKN		Pengembangan wilayah Pembangunan IKN, Superhub Ekonomi IKN, dan Mitra IKN	Konektivitas wilayah Minimnya pusat pertumbuhan	



Potensi yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			ISU Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;	Perlunya atraksi wisata dipantai manggar untuk menarik minat pengunjung sehingga kegiatan di pantai tidak monoton	Industri, inovasi, dan infrastruktur	Perkembangan teknologi	Ketahanan Ekonomi	1.Diversifikasi ekonomi, 2.Pengembangan Industri	Atraksi wisata di pantai manggar
Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;	Balickpapan belum memiliki identitas pariwisata yang kuat dan unik di tingkat nasional	Penanganan dampak pemindahan IKN		Pengembangan wilayah Pembangunan IKN, Superhub Ekonomi IKN, dan Mitra IKN	Konektivitas wilayah Minimnya pusat pertumbuhan	Kurangnya Diferensiasi Brand Pariwisata
		Industri, inovasi, dan infrastruktur	Perkembangan teknologi	Ketahanan Ekonomi	1.Diversifikasi ekonomi, 2.Pengembangan Industri	
Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;	Aktivitas promosi masih tersebar, tidak satu narasi, dan kurang memanfaatkan platform digital secara optimal.	Penanganan dampak pemindahan IKN		Pengembangan wilayah Pembangunan IKN, Superhub Ekonomi IKN, dan Mitra IKN	Konektivitas wilayah Minimnya pusat pertumbuhan	Promosi Digital Belum Terintegrasi dan Konsisten
		Industri, inovasi, dan infrastruktur	Perkembangan teknologi	Ketahanan Ekonomi	1.Diversifikasi ekonomi, 2.Pengembangan Industri	
Perumusan kebijakan	Pemanfaatan lahan Pantai Manggar Segara Sari untuk	Perwujudan kota dan permukima	Urbanisasi masya	Penguatan	Pemenuhan SPM	Keterbatasan lahan destinasi wisata yang

Potensi yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			ISU Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;	sarana dan prasarana sudah terpenuhi	n berkelanjutan (air bersih, sanitasi, dll)	rakat dunia	infrastruktur		dikelola yang merupakan aset Pemerintah Kota Balikpapan
		Penanganan dampak pemindahan IKN		Pengembangan wilayah Pembangunan IKN, Superhub Ekonomi IKN, dan Mitra IKN	Konektivitas wilayah Minimnya pusat pertumbuhan	
Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;	Belum optimalnya pengelolaan destinasi	Industri, inovasi, dan infrastruktur	Perkembangan teknologi	Ketahanan Ekonomi	1.Diversifikasi ekonomi, 2.Pengembangan Industri	Kualitas Daya Tarik dan destinasi wisata
		Penanganan dampak pemindahan IKN		Pengembangan wilayah Pembangunan IKN, Superhub Ekonomi IKN, dan Mitra IKN	Konektivitas wilayah Minimnya pusat pertumbuhan	
Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga,	Kualitas SDM pariwisata dan ekraf belum berdaya saing	"Kesehatan, kesejahteraan, pendidikan berkualitas, dan		Peningkatan kualitas SDM	Kualitas SDM lokal	Sumber Daya Manusia Pariwisata dan ekonomi kreatif

Potensi yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			ISU Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
pariwisata dan ekonomi kreatif;		kesetaraan gender"				
Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;	Minimnya minat pemuda berwirausaha	Pengentasan kemiskinan , pemenuhan gizi dan ketahanan pangan		Penanggulangan kemiskinan	Kemiskinan dan kesenjangan	Kurangnya fasilitasi pemuda berwirausaha
		"Kesehatan, kesejahteraan, pendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender"		Peningkatan kualitas SDM	Kualitas SDM lokal	Kurangnya fasilitasi pemuda berwirausaha
		Penanganan dampak pemindahan IKN		Pengembangan Pembangunan IKN, Superhub Ekonomi IKN, dan Mitra IKN wilayah	Konektivitas Minimnya pusat pertumbuhan wilayah	Kurangnya fasilitasi pemuda berwirausaha
Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;	Rendahnya keterlibatan pemuda dalam kegiatan kemasyarakatan dan Kurangnya kepeloporan pemuda di Kota Balikpapan	Pengentasan kemiskinan , pemenuhan gizi dan ketahanan pangan				Kurangnya minat pemuda mengikuti kegiatan kepeloporan
		Penanganan dampak				

Potensi yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			ISU Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
		pemindahan IKN				
Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;	Kurangnya kaderisasi dan pembinaan anggota muda untuk menjadi pemimpin selanjutnya	Pengentasan kemiskinan, pemenuhan gizi dan ketahanan pangan				Minimnya Regenerasi Kepemimpinan
		Penanganan dampak pemindahan IKN				
Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;	Kelengkapan administrasi organisasi tidak lengkap	Pengentasan kemiskinan, pemenuhan gizi dan ketahanan pangan				Data organisasi kepemudaan tidak valid
		Penanganan dampak pemindahan IKN				
Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;	Kurangnya kepercayaan kepemimpinan perempuan	Pengentasan kemiskinan, pemenuhan gizi dan ketahanan pangan				Partisipasi Anggota Organisasi Perempuan Rendah
		Penanganan dampak pemindahan IKN				

Potensi yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			ISU Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;	Belum ada yang memfasilitasi sarana prasarana untuk kegiatan pemuda disabilitas	Pengentasan kemiskinan, pemenuhan gizi dan ketahanan pangan				Sarana Prasarana untuk kegiatan pemuda disabilitas
		Penanganan dampak pemindahan IKN				

**BAB III**

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

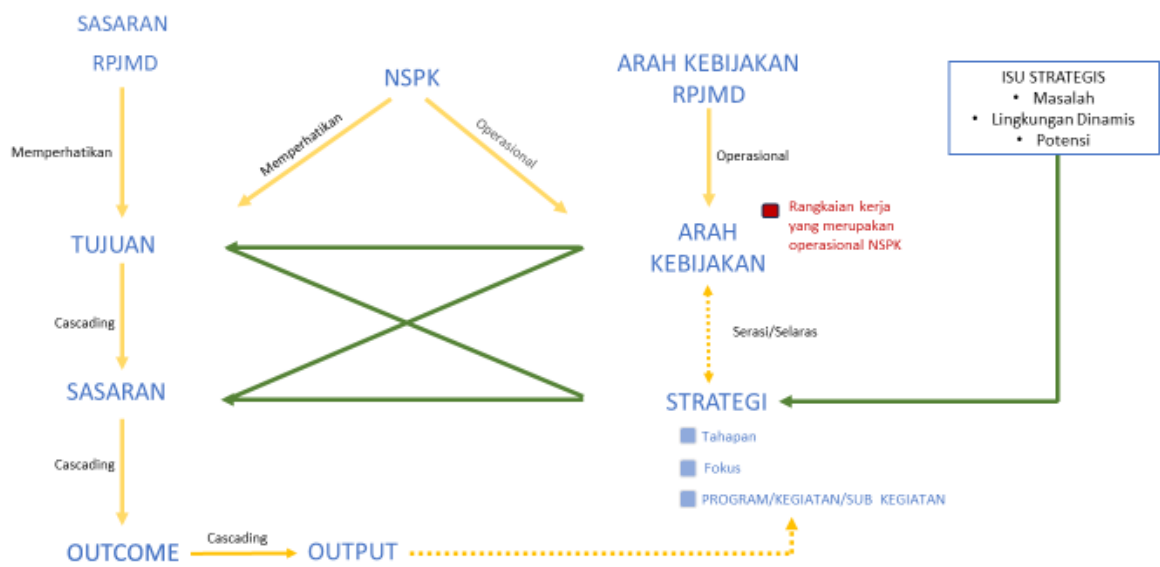
**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA**

**BALIKPAPAN**

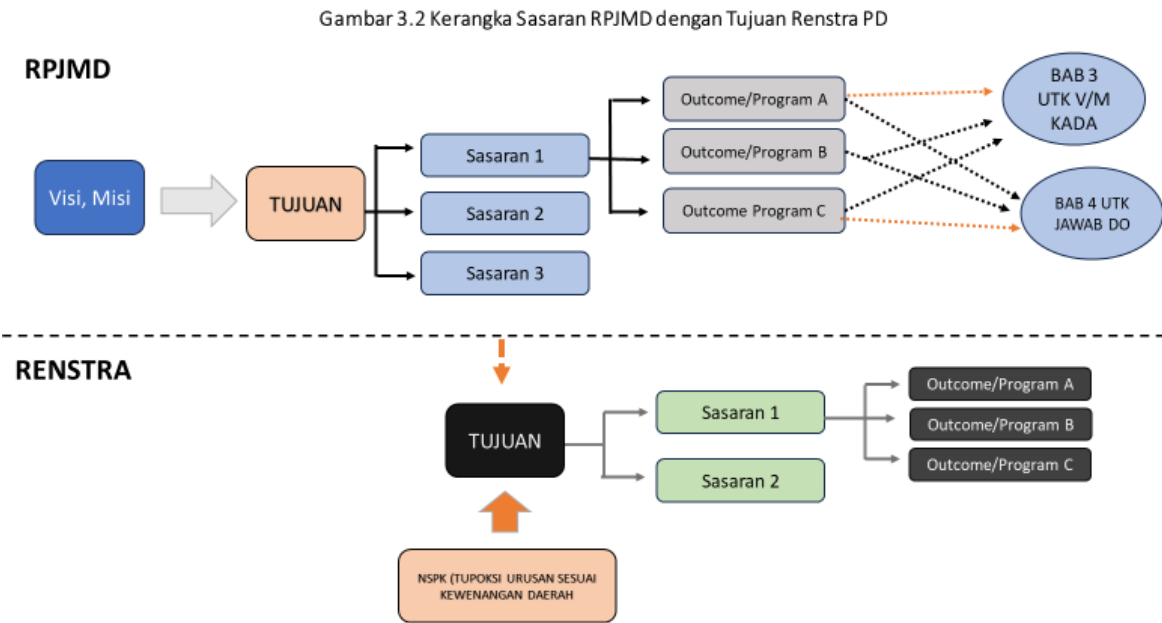
**3.1. Tujuan Renstra Dinas, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

Subbab ini memaparkan tujuan strategis yang hendak dicapai oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Balikpapan dalam kurun waktu 2025-2029. Tujuan-tujuan ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi dinas, serta berfungsi sebagai dasar utama dalam perumusan strategi dan program kerja yang akan dilaksanakan guna mewujudkan target-target pembangunan di sektor kepemudaan, keolahragaan, dan kepariwisataan di Kota Balikpapan.

**Gambar 3. 1 Konsep Renstra PD**



**Gambar 3. 2 Kerangka Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD**





NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVA N	TUJUA N	SASA RAN	INDIKA TOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETE RAN GAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			melalui sertifika si								
		Menin gkatny a presta si olahra ga dan pemb udaya an olahra ga	Jumlah peroleh an medali pada event nasiona l dan interna sional( Medali)	477	477	250	275	300	375	400	
		Menin gkatny a Kualit as Akunt abilita s Kinerj a Instan si Pemer intah	Nilai AKIP Perang kat Daerah (Nilai)	71,07	71,07	71,20	71,30	71,40	71,50	71,60	

**3.2. Strategi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra**

Subbab ini menguraikan strategi utama yang akan diterapkan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan selama periode Renstra 2025-2029, diproyeksikan dalam tahapan tahunan. Strategi ini dirancang untuk merealisasikan Tujuan Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif serta peran pemuda dan olahraga dalam pembangunan, beserta sasaran dan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Proyeksi tahunan ini akan menjadi panduan bagi seluruh program dan kegiatan dinas, memastikan keselarasan upaya dalam mencapai visi dan misi yang diemban.

**a) Strategi Umum**

**• Peningkatan Kolaborasi dan Kemitraan**

Membangun dan memperkuat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, komunitas, akademisi, dan media, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya, berbagi pengetahuan, dan memperluas jangkauan program dan kegiatan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan pariwisata.



- Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan**  
Meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas aparatur dinas melalui pelatihan, pendidikan berkelanjutan, serta pengembangan sistem kerja yang efektif dan efisien. Ini juga termasuk penguatan struktur organisasi dan tata kelola dinas agar lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika perubahan.
- Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi**  
Mengadopsi dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini dalam setiap aspek operasional dinas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, hingga promosi. Inovasi dalam program dan layanan akan didorong untuk meningkatkan daya saing dan relevansi di sektor kepemudaan, keolahragaan, dan pariwisata.
- Penguatan Partisipasi Masyarakat**  
Mendorong keterlibatan aktif masyarakat, terutama pemuda, pelaku olahraga, dan pegiat pariwisata, dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta pemantauan dan evaluasi. Partisipasi ini esensial untuk memastikan program-program dinas relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Balikpapan.
- Pengelolaan Keuangan yang Efisien dan Akuntabel:**  
Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel dalam setiap alokasi dan pemanfaatan anggaran. Prioritas akan diberikan pada program-program yang memiliki dampak signifikan dan terukur.

Berikut merupakan tabel rencana strategi yang dibagi per tahapan untuk mencapai tujuan dan Sasaran yang tertuang pada Dokumen renstra Disporapar 2025-2029:

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran (IKS)	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
1. Meningkatkan Daya Saing Pariwisata	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (Hari)	- Penyusunan strategi peningkatan length of stay wisatawan- Pemetaan aktivitas dan atraksi penunjang agar wisatawan menginap lebih lama- Peningkatan promosi destinasi sekitar	- Revitalisasi destinasi unggulan agar layak kunjungan lebih dari 1 hari- Penambahan event , - Kerja sama dengan hotel untuk paket stay & explore- Pengembangan transportasi wisata terintegrasi	- Diversifikasi produk wisata tematik (eco-tourism, heritage, kuliner)- Integrasi ekraf dan kuliner lokal dalam paket wisata- Penyelenggaraan event tahunan yang berdurasi beberapa hari- Penguatan promosi long stay package	- Pengembangan kawasan wisata terpadu dengan berbagai aktivitas (outdoor, edukasi, belanja)- Peningkatan konektivitas antar destinasi dan akomodasi- Peningkatan kualitas layanan	- Evaluasi capaian peningkatan lama tinggal wisatawan,- Pengembangan atraksi unggulan baru yang mendorong lama tinggal >2 hari

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran (IKS)	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
		Balikipapan (city tour, wisata alam terdekat)			wisata berbasis CHSE	
2. Ekonomi Kreatif yang Semakin Berkembang dan Berdaya Saing	Nilai Investasi Ekonomi Kreatif (Rp miliar)	Masterplan, pemetaan subsektor, pendirian creative hub, pelatihan dasar	Pelatihan lanjutan, 3 kawasan tematik, sertifikasi produk, akses pembiayaan	Promosi nasional/internasional, integrasi ekraf-pariwisata, kemitraan e-commerce	Diversifikasi produk, penguatan rantai pasok, festival kreatif	Evaluasi capaian dan pembaruan strategi, Peningkatan kontribusi ekraf terhadap PDRB Kota Balikpapan >10%
3. Meningkatkan Prestasi Olahraga dan Pembudayaan Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event nasional dan internasional (Medali)	- Pemetaan cabang olahraga unggulan yang berpotensi meraih medali.- Pembentukan dan pembinaan tim pelatih serta supporting staff.- Pelatihan fisik, teknik, dan mental atlet.- Pengiriman atlet ke kejuaraan tingkat provinsi sebagai uji tanding.	- Intensifikasi talent scouting dan pembinaan atlet muda.- Pemusatan latihan (training camp) untuk cabang prioritas.- Peningkatan kualitas sarana latihan.- Partisipasi di lebih banyak event nasional.	- Optimalisasi sports science dan gizi atlet.- Uji coba dan sparring dengan atlet dari luar daerah.- Dukungan peralatan olahraga berstandar nasional.- Persiapan khusus untuk Porprov/PON.	- Pencapaian target medali emas di Porprov/PON.- Program regenerasi atlet.- Pelatihan lanjutan untuk pelatih dan tenaga pendukung.- Penguatan kerjasama dengan klub olahraga profesional.	- Partisipasi di event internasional.- Pembaruan strategi pembinaan pasca-2030.-

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran (IKS)	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
4. Meningkatkan Kualitas Pemuda	Persentase pemuda yang memiliki kompetensi melalui sertifikasi (%)	- Pemetaan bidang keterampilan dan minat pemuda.- Sosialisasi program sertifikasi kompetensi melalui komunitas dan organisasi kepemudaan.	- Penambahan jumlah pelatihan teknis berbasis SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)..- Monitoring pasca-pelatihan untuk memastikan kelulusan sertifikasi.- Penguatan jejaring kerjasama dengan industri lokal.	- Penyelenggaraa training of trainers (ToT) bagi instruktur lokal. Pengembangan e learning untuk materi kompetensi tertentu. Mendorong partisipasi pemuda dalam u kompetensi nasional dan internasional. Penilaian ulang standar kurikulum pelatihan.	- Fasilitas sertifikasi kompetensi , Peningkatan kerjasama dengan perusahaan untuk penempatan kerja.- Evaluasi capaian dan pembaruan metode pelatihan.	- Pencapaian target sertifikasi , - Penguatan peran organisasi pemuda sebagai mitra penyelenggara pelatihan.
5. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP (Nilai)	Roadmap peningkatan SAKIP, pelatihan perencanaan & pelaporan, LKjIP berkualitas	Penyempurnaan e-SAKIP, monev triwulan, penguatan pengendalian internal	Integrasi perencanaan-penganggaran-pelaporan berbasis aplikasi	Penerapan performance agreement, inovasi berbasis kinerja, evaluasi internal	Review strategi pasca-2030, replikasi best practice, pemanfaatan data kinerja

### 3.3. Arah Kebijakan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra

Arah kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan selama periode 2025-2029. Arah kebijakan ini dirumuskan untuk memastikan pencapaian Tujuan Pembangunan Kota Balikpapan dan Sasaran yang di ampu oleh Organisasi Perangkat Daerah ini menjadi panduan strategis bagi seluruh program dan kegiatan dinas agar selaras dengan visi dan misi yang telah di ampu oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Balikpapan. Antara Lain Sebagai Berikut:

Tabel 3. 5 Arah Kebijakan Renstra

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran Renstra	Arah Kebijakan Renstra	Keterkaitan dengan Arah Kebijakan RPJMD
<p>-NSPK Kepariwisataan: UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Permenparekraf terkait pengelolaan destinasi dan promosi.</p> <p>-Perda Ripda No 7 Tahun 2016</p>	<p>Meningkatnya Produktifitas Perekonomian Daerah yang</p> <p>1. Berkelanjutan</p> <p>2. SDM yang cerdas dan sehat</p>	<p>Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB</p>	<p>Meningkatnya Daya Saing Pariwisata</p>	<p>Peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah melalui pengembangan destinasi pariwisata yang berkelanjutan, berdaya saing, dan inklusif, pengembangan industri pariwisata, optimalisasi pemasaran dan promosi pariwisata, serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia pariwisata</p>	<p>Mendukung produktivitas perekonomian daerah berkelanjutan melalui penguatan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal.</p>
<p>NSPK Ekraf: UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Permenparekraf terkait fasilitasi dan pengembangan ekraf.</p>			<p>Ekonomi Kreatif yang semakin berkembang dan berdaya saing</p>	<p>Peningkatan pertumbuhan ekonomi kreatif yang inovatif dan berkelanjutan melalui fasilitasi peningkatan kompetensi dan profesionalism</p>	<p>Mendukung produktivitas perekonomian daerah berkelanjutan melalui penguatan sektor</p>

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran Renstra	Arah Kebijakan Renstra	Keterkaitan dengan Arah Kebijakan RPJMD
				e sumber daya manusia ekonomi kreatif, peningkatan nilai investasi pada sektor ekonomi kreatif, serta pengembangan dan promosi produk kreatif berbasis potensi lokal yang berdaya saing	ekonomi kreatif.
<p>-NSPK Kepemudaan: UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Permenpora tentang pembinaan dan pengembangan pemuda.</p> <p>-Perda No 1 Tahun 2022, Tentang Pelayanan Kepemudaan</p> <p>-Grand Design Pembangunan Kepemudaan Tahun 2021-2035</p>		Tingkat Daya Saing Pemuda	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Pengembangan kualitas pemuda sebagai SDM yang cerdas, inovatif, dan produktif melalui pendidikan kepemudaan, pelatihan kewirausahaan, dan pembinaan karakter.	Mendukung terwujudnya SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi.
-NSPK Keolahragaan: UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Permenpora tentang pembinaan		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Meningkatnya prestasi olahraga dan pembudayaan olahraga	Meningkatkan Prestasi dan SDM Keolahragaan baik Olahraga Prestasi, Olahraga pendidikan,	Mendukung terwujudnya SDM yang sehat dan produktif.

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran Renstra	Arah Kebijakan Renstra	Keterkait an dengan Arah Kebijakan RPJMD
prestasi dan olahraga masyarakat.  -Perpres No 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON)  -Kajian Desain Olahraga Daerah Tahun 2023  -Kajian PPLPD Tahun 2023				Olahraga Masyarakat dan Pengembangan Sarana Prasarana Olahraga Serta Wisata Olahraga	
-NSPK Reformasi Birokrasi: PermenPAN-RB tentang SAKIP, Peraturan BPKP tentang monitoring dan evaluasi kinerja.			Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Peningkatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja Disporapar secara efektif dan transparan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.	Mendukung terwujudnya pemerintahan yang akuntabel sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Tujuan dan sasaran merupakan kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan dan sasaran pembangunan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pemerintah.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 :

1. Meningkatnya Produktifitas Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan
2. SDM yang cerdas dan sehat

Berdasarkan visi dan misi walikota terpilih maka Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan mengemban Tujuan Kota yaitu Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif serta peran pemuda dan olahraga dalam Pembangunan.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

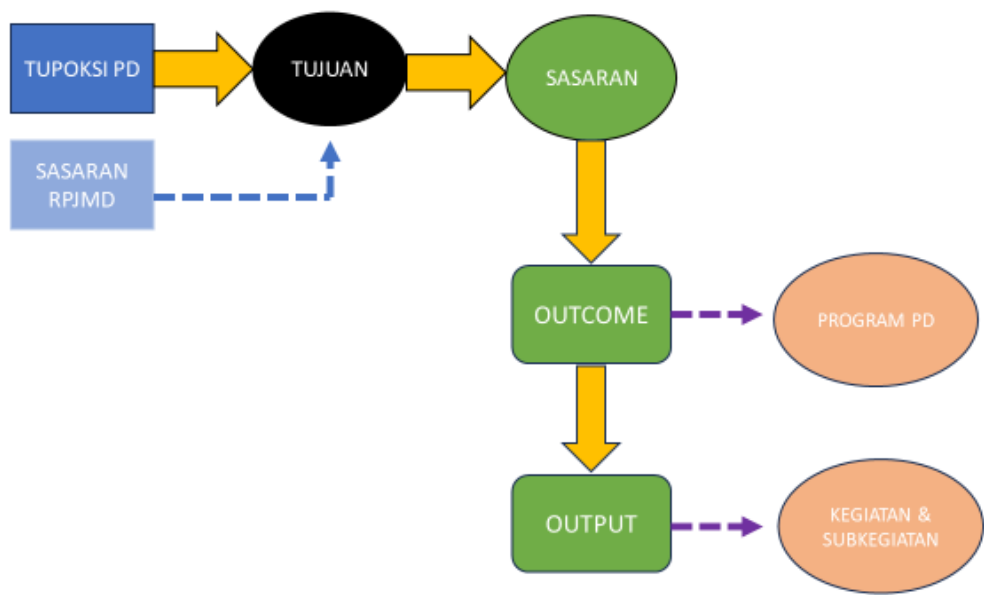
Pengertian 'bersifat indikatif' dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Mengacu pada rencana program dalam RPJMD 2025-2029 Kota Balikpapan yang terdiri dari program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
3. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
5. Program Pemasaran Pariwisata
6. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mengetahui prestasi, kinerja tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dinas, maka disusunlah program,

kegiatan dan sub kegiatan beserta pendanaannya. Yang mengacu pada program prioritas yang ada di dalam RPJMD periode 2025 - 2029.

Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah Pemerintah Kota Balikpapan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BAS ELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					51.725.221.266,00		53.276.977.836,00		55.940.826.916,00		58.189.535.097,00		67.467.829.681,00	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.399.505.545,00		16.891.490.690,00		17.736.065.284,00		18.449.019.262,00		21.390.706.891,00	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	87,07	88,18	89,18	16.399.505.545,00	89,39	16.891.490.690,00	89,59	17.736.065.284,00	89,80	18.449.019.262,00	90,00	21.390.706.891,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					7.530.347.977,00		7.756.258.406,00		8.144.071.354,00		8.471.446.563,00		9.822.214.817,00	
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan (%)	2,28	2,28	2,30	7.530.347.977,00	2,32	7.756.258.406,00	2,34	8.144.071.354,00	2,36	8.471.446.563,00	2,38	9.822.214.817,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKA TOR OUTCO ME	BAS ELIN E 202 4	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERA NGKA T DAER AH PENA NGGU NG JAWA B
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGA N KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					27.161.83 7.744,00		27.976.692 .841,00		29.375.52 7.582,00		30.556.36 4.420,00		35.428.56 2.660,00	
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Medali yang Diraih Atlet dan Pegiat Olahraga pada Tingkat Provinsi (Medali)	252	252	500	27.161.83 7.744,00	510	27.976.692 .841,00	515	29.375.52 7.582,00	520	30.556.36 4.420,00	525	35.428.56 2.660,00	Dinas/ Badan yang menang ani Bidang Kepemu daan Dan Olahrag a
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGA N KAPASITAS KEPRAMUKAAN					633.530.0 00,00		652.535.89 9,00		685.162.6 96,00		712.704.8 52,00		826.345.3 13,00	
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepramuk aan (%)	3,23	3,23	3,30	633.530.0 00,00	3,40	652.535.89 9,00	3,50	685.162.6 96,00	3,60	712.704.8 52,00	3,70	826.345.3 13,00	Dinas/ Badan yang menang ani Bidang Kepemu daan Dan Olahrag a
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					16.943.18 1.734,00		17.451.477 .164,00		18.324.05 1.084,00		19.060.64 0.903,00		22.099.85 1.319,00	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					6.464.855 .658,00		6.658.801. 319,00		6.991.741. 409,00		7.272.795 .283,00		8.432.439 .142,00	
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi WIsata	Persentase Pertumbu han Kualitas Standar Layanan Usaha Destinasi Wisata (%)	3,8	3,8	3,7	6.464.855 .658,00	3,6	6.658.801. 319,00	3,5	6.991.741. 409,00	3,4	7.272.795 .283,00	3,3	8.432.439 .142,00	Dinas/ Badan yang menang ani Bidang Pariwis ata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					7.017.379 .826,00		7.227.901. 212,00		7.589.296. 298,00		7.894.370 .670,00		9.153.124 .439,00	
Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	Persentase Pertumbu han Wisatawa n (%)	4,37	4,38	4,40	7.017.379 .826,00	4,42	7.227.901. 212,00	4,44	7.589.296. 298,00	4,47	7.894.370 .670,00	4,49	9.153.124 .439,00	Dinas/ Badan yang menang ani Bidang Pariwis ata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGA N EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					2.149.185 .000,00		2.469.774. 633,00		2.400.000. 000,00		2.550.000 .000,00		2.814.287 .738,00	
Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentas e)	18	18	18	2.149.185 .000,00	20	2.469.774. 633,00	23	2.400.000. 000,00	25	2.550.000 .000,00	29	2.814.287 .738,00	Dinas/ Badan yang menang ani Bidang Pariwis ata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGA N SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					1.311.761 .250,00		1.095.000. 000,00		1.343.013. 377,00		1.343.474 .950,00		1.700.000 .000,00	
Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang	7	7	7	1.311.761 .250,00	7,5	1.095.000. 000,00	7,7	1.343.013. 377,00	7,9	1.343.474 .950,00	8	1.700.000 .000,00	Dinas/ Badan yang menang ani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKA TOR OUTCO ME	BAS ELIN E 202 4	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERA NGKA T DAER AH PENA NGGU NG JAWA B
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
	Ditingkatk an Kompeten sinya (%)													Pariwis ata
TOTAL KESELURUHAN					68.668.40 3.000,00		70.728.455 .000,00		74.264.87 8.000,00		77.250.17 6.000,00		89.567.68 1.000,00	

Tabel 4. 2 Teknik Merumuskan Program,Kegiatan,Sub Kegiatan  
Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
<b>SASARAN RPJMD :</b> <b>1.Meningkatnya Produktifitas Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan</b>  <b>2.SDM yang cerdas dan sehat</b>	<b>Tujuan:</b> <b>Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif serta peran pemuda dan olahraga dalam pembangunan</b>	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata			Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (Hari)	<b>3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>	
						<b>3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	
						3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
						3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
						3.26.02.2.02.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
						3.26.02.2.02.0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
						<b>3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (KEGIATAN)</b>	
						3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
						3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
						<b>3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota [KEGIATAN]</b>	
						3.26.02.2.04.0012 Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	
						<b>3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	
						<b>3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota [KEGIATAN]</b>	
						3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	
						3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
						3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
						3.26.03.2.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
		Ekonomi Kreatif yang semakin berkembang dan berdaya saing			Nilai Investasi Ekonomi Kreatif (Rupiah)	<b>Urusan Pariwisata / Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</b>	
						<b>Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota</b>	
						3.26.04.2.01.0001 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif [kegiatan]	
						<b>3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif [KEGIATAN]</b>	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
						3.26.04.2.02.0003 Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	
						3.26.04.2.02.0004 Penyediaan Infrastruktur	
						3.26.04.2.02.0014 Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	
						3.26.04.2.02.0016 Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	
						3.26.04.2.02.0017 Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	
						3.26.04.2.02.0022 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	
						<b>Urusan Pariwisata / Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>	
						<b>3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (KEGIATAN)</b>	
						3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
						3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	
						3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	
						<b>3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif (KEGIATAN)</b>	
						3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
						3.26.05.2.02.0006 Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	
						3.26.05.2.02.0007 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	
		Meningkatnya Kualitas Pemuda			Persentase pemuda yang mendapatkan sertifikat kompetensi	<b>Urusan Kepemudaan dan keolahragaan / Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b>	
						<b>2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota (KEGIATAN)</b>	
						2.19.02.2.01.0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	
						2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	
						2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
						2.19.02.2.01.0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	
						<b>2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (KEGIATAN)</b>	
						2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
						<b>Urusan Kepemudaan dan keolahragaan / Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</b>	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
						<b>2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	
						Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	
		Meningkatnya prestasi olahraga dan pembudayaan olahraga			Peningkatan Prestasi Olahraga (Medali)	Urusan Kepemudaan dan keolahragaan/ Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	
						<b>2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota [KEGIATAN]</b>	
						2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota [SUB KEG]	
						2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga [SUBKEG]	
						<b>2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi [KEGIATAN]</b>	
						2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
						2.19.03.2.03.0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )	
						2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
						<b>2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga [KEGIATAN]</b>	
						2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	
						<b>2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi [KEGIATAN]</b>	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
						2.19.03.2.05.0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	
						2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	<b>Urusan Kepemudaan dan keolahragaan/ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
						<b>2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
						2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						<b>2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
						2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
						<b>2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
						2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						<b>2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
						2.19.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						<b>2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
						2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						<b>2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
						2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						2.19.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	
						2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	



Tabel 4. 3 Rencana Program,Kegiatan,Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				51.725.221.266,00		53.276.977.836,00		55.940.826.916,00		58.189.535.097,00		67.467.829.681,00		
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.399.505.545,00		16.891.490.690,00		17.736.065.284,00		18.449.019.262,00		21.390.706.891,00		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	87,07	89,18	16.399.505.545,00	89,39	16.891.490.690,00	89,59	17.736.065.284,00	89,80	18.449.019.262,00	90,00	21.390.706.891,00	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.712.021.120,00		9.812.021.120,00		10.012.021.120,00		10.212.021.120,00		10.712.021.120,00		
Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	34	65	9.712.021.120,00	68	9.812.021.120,00	68	10.012.021.120,00	68	10.212.021.120,00	68	10.712.021.120,00		
2.19.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.712.021.120,00		9.812.021.120,00		10.012.021.120,00		10.212.021.120,00		10.712.021.120,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	34	65	9.712.021.120,00	68	9.812.021.120,00	68	10.012.021.120,00	68	10.212.021.120,00	68	10.712.021.120,00		
2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				99.520.000,00		99.520.000,00		99.520.000,00		180.000.000,00		250.000.000,00		
Terwujudnya profesionalisme aparatur perangkat daerah.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	1	99.520.000,00	1	99.520.000,00	1	99.520.000,00	1	180.000.000,00	1	250.000.000,00		
2.19.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				99.520.000,00		99.520.000,00		99.520.000,00		180.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	1	99.520.000,00	1	99.520.000,00	1	99.520.000,00	1	180.000.000,00	1	250.000.000,00		
2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.746.702.370,00		1.846.702.370,00		2.166.702.370,00		2.246.702.370,00		2.885.051.993,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terwujudnya layanan umum perkantoran perangkat daerah.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	54	75	1.746.702.370,00	76	1.846.702.370,00	78	2.166.702.370,00	78	2.246.702.370,00	80	2.885.051.993,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	2		4		4		5		5			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	9	8		9		10		10		11			
2.19.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				261.650.377,00		261.650.377,00		381.650.377,00		461.650.377,00		650.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	2	261.650.377,00	4	261.650.377,00	4	381.650.377,00	5	461.650.377,00	5	650.000.000,00		
2.19.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.135.051.993,00		1.135.051.993,00		1.335.051.993,00		1.335.051.993,00		1.635.051.993,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	9	8	1.135.051.993,00	9	1.135.051.993,00	10	1.335.051.993,00	10	1.335.051.993,00	11	1.635.051.993,00		
2.19.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		600.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	54	75	350.000.000,00	76	450.000.000,00	78	450.000.000,00	78	450.000.000,00	80	600.000.000,00		
2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				583.980.000,00		583.980.000,00		683.980.000,00		683.980.000,00		750.000.000,00		
Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4	4	583.980.000,00	4	583.980.000,00	6	683.980.000,00	6	683.980.000,00	6	750.000.000,00		
2.19.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				583.980.000,00		583.980.000,00		683.980.000,00		683.980.000,00		750.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4	4	583.980.000,00	4	583.980.000,00	6	683.980.000,00	6	683.980.000,00	6	750.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.082.279.230,00		3.162.279.230,00		3.162.279.230,00		3.362.279.230,00		4.258.283.230,00		
Terwujudnya operasional umum perangkat daerah.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	3	3.082.279.230,00	3	3.162.279.230,00	3	3.162.279.230,00	3	3.362.279.230,00	3	4.258.283.230,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	8		8		9		9		9			
2.19.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.708.283.230,00		1.708.283.230,00		1.708.283.230,00		1.808.283.230,00		2.308.283.230,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	3	1.708.283.230,00	3	1.708.283.230,00	3	1.708.283.230,00	3	1.808.283.230,00	3	2.308.283.230,00		
2.19.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.373.996.000,00		1.453.996.000,00		1.453.996.000,00		1.553.996.000,00		1.950.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	8	1.373.996.000,00	8	1.453.996.000,00	9	1.453.996.000,00	9	1.553.996.000,00	9	1.950.000.000,00		
2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.175.002.825,00		1.386.987.970,00		1.611.562.564,00		1.764.036.542,00		2.535.350.548,00		
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar berfungsi optimal.	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	43	45	1.175.002.825,00	46	1.386.987.970,00	47	1.611.562.564,00	48	1.764.036.542,00	49	2.535.350.548,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	162	165		166		167		168		169			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	48	48		48		48		48		48			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.19.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				760.002.825,00		851.987.970,00		851.987.970,00		901.987.970,00		1.200.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	48	48	760.002.825,00	48	851.987.970,00	48	851.987.970,00	48	901.987.970,00	48	1.200.000.000,00		
2.19.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	43	45	15.000.000,00	46	15.000.000,00	47	15.000.000,00	48	15.000.000,00	49	35.000.000,00		
2.19.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				330.000.000,00		330.000.000,00		374.574.594,00		424.574.594,00		780.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	162	165	330.000.000,00	166	330.000.000,00	167	374.574.594,00	168	424.574.594,00	169	780.000.000,00		
2.19.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				70.000.000,00		190.000.000,00		370.000.000,00		422.473.978,00		520.350.548,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	70.000.000,00	1	190.000.000,00	1	370.000.000,00	1	422.473.978,00	1	520.350.548,00		
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				7.530.347.977,00		7.756.258.406,00		8.144.071.354,00		8.471.446.563,00		9.822.214.817,00		
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan (%)	2,28	2,30	7.530.347.977,00	2,32	7.756.258.406,00	2,34	8.144.071.354,00	2,36	8.471.446.563,00	2,38	9.822.214.817,00	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				4.030.347.977,00		4.256.258.406,00		4.544.071.354,00		4.783.534.117,00		5.808.477.479,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader di kota balikpapan secara terpadu dan berkelanjutan.	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen)	1	1	4.030.347.977,00	1	4.256.258.406,00	1	4.544.071.354,00	1	4.783.534.117,00	1	5.808.477.479,00		
	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	1.940	1.950		1.960		1.970		1.980		1.990			
	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	515	520		530		540		550		560			
	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	0	0		390		395		396		400			
2.19.02.2.01.0010 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota				300.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		387.912.460,00		497.568.164,00		
Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen)	1	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	350.000.000,00	1	387.912.460,00	1	497.568.164,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota				1.724.347.977,00		1.724.347.977,00		1.818.254.451,00		1.900.073.384,00		2.219.804.776,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	515	520	1.724.347.977,00	530	1.724.347.977,00	540	1.818.254.451,00	550	1.900.073.384,00	560	2.219.804.776,00		
2.19.02.2.01.0012 - Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda				0,00		225.910.429,00		319.816.903,00		401.635.825,00		721.367.195,00		
Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	0	0	0,00	390	225.910.429,00	395	319.816.903,00	396	401.635.825,00	400	721.367.195,00		
2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota				2.006.000.000,00		2.006.000.000,00		2.056.000.000,00		2.093.912.448,00		2.369.737.344,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	1.940	1.950	2.006.000.000,00	1.960	2.006.000.000,00	1.970	2.056.000.000,00	1.980	2.093.912.448,00	1.990	2.369.737.344,00		
2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				3.500.000.000,00		3.500.000.000,00		3.600.000.000,00		3.687.912.446,00		4.013.737.338,00		
Terlaksananya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dalam rangka memperkuat kapasitas, peran, dan kemandirian organisasi kepemudaan di kota Balikpapan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	1	1	3.500.000.000,00	1	3.500.000.000,00	1	3.600.000.000,00	1	3.687.912.446,00	1	4.013.737.338,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				3.500.000.000,00		3.500.000.000,00		3.600.000.000,00		3.687.912.446,00		4.013.737.338,00		
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	1	1	3.500.000.000,00	1	3.500.000.000,00	1	3.600.000.000,00	1	3.687.912.446,00	1	4.013.737.338,00		
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				27.161.837.744,00		27.976.692.841,00		29.375.527.582,00		30.556.364.420,00		35.428.562.660,00		
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Medali yang Diraih Atlet dan Pegiat Olahraga pada Tingkat Provinsi (Medali)	252	500	27.161.837.744,00	510	27.976.692.841,00	515	29.375.527.582,00	520	30.556.364.420,00	525	35.428.562.660,00	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				16.063.257.744,00		7.934.465.000,00		5.000.000.000,00		10.000.000.000,00		16.000.000.000,00		
Terlaksananya kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota sebagai wadah pembinaan, peningkatan prestasi, dan pengembangan potensi atlet di berbagai cabang olahraga.	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	2	4	16.063.257.744,00	15	7.934.465.000,00	15	5.000.000.000,00	15	10.000.000.000,00	15	16.000.000.000,00		
	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	771	900		500		700		500		1.200			
2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				2.500.000.000,00		1.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	2	4	2.500.000.000,00	15	1.000.000.000,00	15	2.000.000.000,00	15	2.000.000.000,00	15	1.000.000.000,00		
2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				13.563.257.744,00		6.934.465.000,00		3.000.000.000,00		8.000.000.000,00		15.000.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	771	900	13.563.257.744,00	500	6.934.465.000,00	700	3.000.000.000,00	500	8.000.000.000,00	1.200	15.000.000.000,00		
2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				650.000.000,00		9.800.000.000,00		12.000.000.000,00		7.000.000.000,00		7.000.000.000,00		
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing atlet daerah di tingkat nasional maupun internasional.	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	0	0	650.000.000,00	750	9.800.000.000,00	300	12.000.000.000,00	750	7.000.000.000,00	1.500	7.000.000.000,00		
	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda)	1	1				1		1					
	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	202	500				750		100		250			300
2.19.03.2.03.0007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga				50.000.000,00		8.000.000.000,00		9.000.000.000,00		4.000.000.000,00		5.000.000.000,00		
Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	202	500	50.000.000,00	750	8.000.000.000,00	100	9.000.000.000,00	250	4.000.000.000,00	300	5.000.000.000,00		
2.19.03.2.03.0008 - Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )				600.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda)	1	1	600.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota				0,00		800.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	0	0	0,00	750	800.000.000,00	300	2.000.000.000,00	750	2.000.000.000,00	1.500	1.000.000.000,00		
2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				2.875.000.000,00		3.400.000.000,00		4.900.000.000,00		6.400.000.000,00		5.900.000.000,00		
Terlaksananya pengembangan organisasi olahraga di Kota Balikpapan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pengurus, dan perluasan jejaring kerja sama antarorganisasi olahraga.	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	5	5	2.875.000.000,00	5	3.400.000.000,00	5	4.900.000.000,00	5	6.400.000.000,00	5	5.900.000.000,00		
2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait				2.875.000.000,00		3.400.000.000,00		4.900.000.000,00		6.400.000.000,00		5.900.000.000,00		
Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	5	5	2.875.000.000,00	5	3.400.000.000,00	5	4.900.000.000,00	5	6.400.000.000,00	5	5.900.000.000,00		
2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				7.573.580.000,00		6.842.227.841,00		7.475.527.582,00		7.156.364.420,00		6.528.562.660,00		
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi di Kota Balikpapan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, memperluas akses terhadap kegiatan olahraga, serta mendukung pola hidup sehat dan bugar.	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	3	4	7.573.580.000,00	4	6.842.227.841,00	4	7.475.527.582,00	4	7.156.364.420,00	4	6.528.562.660,00		
	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
2.19.03.2.05.0009 - Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan				5.873.580.000,00		4.797.827.000,00		5.003.229.282,00		4.693.092.056,00		4.143.092.056,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	1	1	5.873.580.000,00	1	4.797.827.000,00	1	5.003.229.282,00	1	4.693.092.056,00	1	4.143.092.056,00		
2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional				1.700.000.000,00		2.044.400.841,00		2.472.298.300,00		2.463.272.364,00		2.385.470.604,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	3	4	1.700.000.000,00	4	2.044.400.841,00	4	2.472.298.300,00	4	2.463.272.364,00	4	2.385.470.604,00		
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				633.530.000,00		652.535.899,00		685.162.696,00		712.704.852,00		826.345.313,00		
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepramukaan (%)	3,23	3,30	633.530.000,00	3,40	652.535.899,00	3,50	685.162.696,00	3,60	712.704.852,00	3,70	826.345.313,00	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				633.530.000,00		652.535.899,00		685.162.696,00		712.704.852,00		826.345.313,00		
Terlaksananya peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan di Kota Balikpapan.	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi )	1	1	633.530.000,00	1	652.535.899,00	1	685.162.696,00	1	712.704.852,00	1	826.345.313,00		
2.19.04.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah				633.530.000,00		652.535.899,00		685.162.696,00		712.704.852,00		826.345.313,00		
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi )	1	1	633.530.000,00	1	652.535.899,00	1	685.162.696,00	1	712.704.852,00	1	826.345.313,00		
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				16.943.181.734,00		17.451.477.164,00		18.324.051.084,00		19.060.640.903,00		22.099.851.319,00		
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				6.464.855.658,00		6.658.801.319,00		6.991.741.409,00		7.272.795.283,00		8.432.439.142,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata	Persentase Pertumbuhan Kualitas Standar Layanan Usaha Destinasi Wisata (%)	3,8	3,7	6.464.855.658,00	3,6	6.658.801.319,00	3,5	6.991.741.409,00	3,4	7.272.795.283,00	3,3	8.432.439.142,00	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1.454.416.525,00		1.498.049.019,00		1.572.951.477,00		1.636.180.945,00		1.897.069.245,00		
Terlaksananya pengelolaan kawasan strategis pariwisata kota Balikpapan secara terpadu, berkelanjutan, dan berdaya saing.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	1.454.416.525,00	1	1.498.049.019,00	1	1.572.951.477,00	1	1.636.180.945,00	1	1.897.069.245,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	5	1		1		1		1		1			
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	150	150		150		150		150		150			
3.26.02.2.02.0002 - Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
3.26.02.2.02.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				523.936.025,00		498.049.019,00		572.951.477,00		636.180.945,00		797.069.245,00		
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	5	1	523.936.025,00	1	498.049.019,00	1	572.951.477,00	1	636.180.945,00	1	797.069.245,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.26.02.2.02.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				830.480.500,00		850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		950.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	150	150	830.480.500,00	150	850.000.000,00	150	850.000.000,00	150	850.000.000,00	150	950.000.000,00		
3.26.02.2.02.0009 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				4.930.661.633,00		5.078.581.475,00		5.332.510.566,00		5.546.866.714,00		6.431.312.057,00		
Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat dalam destinasi Pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	1	1	4.930.661.633,00	1	5.078.581.475,00	1	5.332.510.566,00	1	5.546.866.714,00	1	6.431.312.057,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1	2				2				2			
3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				4.626.816.470,00		4.765.620.958,00		5.003.902.022,00		5.205.048.771,00		6.034.991.400,00		
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	1	1	4.626.816.470,00	1	4.765.620.958,00	1	5.003.902.022,00	1	5.205.048.771,00	1	6.034.991.400,00		
3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				303.845.163,00		312.960.517,00		328.608.544,00		341.817.943,00		396.320.657,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1	2	303.845.163,00	2	312.960.517,00	2	328.608.544,00	2	341.817.943,00	2	396.320.657,00		
3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota				79.777.500,00		82.170.825,00		86.279.366,00		89.747.624,00		104.057.840,00		
Terlaksananya Kegiatan Investasi Usaha Jasa Pariwisata di Kota Balikpapan	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota (Laporan)	1	2	79.777.500,00	2	82.170.825,00	2	86.279.366,00	2	89.747.624,00	2	104.057.840,00		
3.26.02.2.04.0012 - Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota				79.777.500,00		82.170.825,00		86.279.366,00		89.747.624,00		104.057.840,00		
Meningkatnya Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota (Laporan)	1	2	79.777.500,00	2	82.170.825,00	2	86.279.366,00	2	89.747.624,00	2	104.057.840,00		
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				7.017.379.826,00		7.227.901.212,00		7.589.296.298,00		7.894.370.670,00		9.153.124.439,00		
Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Wisatawan (%)	4,37	4,40	7.017.379.826,00	4,42	7.227.901.212,00	4,44	7.589.296.298,00	4,47	7.894.370.670,00	4,49	9.153.124.439,00	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				7.017.379.826,00		7.227.901.212,00		7.589.296.298,00		7.894.370.670,00		9.153.124.439,00		
Terselenggaranya Kerjasama mitra kerja pariwisata, Promosi Pariwisata dan Kegiatan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	3	3	7.017.379.826,00	3	7.227.901.212,00	3	7.589.296.298,00	3	7.894.370.670,00	3	9.153.124.439,00		
	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	2	2		2		2		2					
	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	10	10		10		10		10					
3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				908.920.000,00		936.187.598,00		982.996.982,00		1.022.511.475,00		1.185.550.459,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	2	2	908.920.000,00	2	936.187.598,00	2	982.996.982,00	2	1.022.511.475,00	2	1.185.550.459,00		
3.26.03.2.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				5.437.828.725,00		5.600.963.580,00		5.881.011.778,00		6.117.416.565,00		7.092.835.820,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	10	10	5.437.828.725,00	10	5.600.963.580,00	10	5.881.011.778,00	10	6.117.416.565,00	10	7.092.835.820,00		
3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				670.631.101,00		690.750.034,00		725.287.538,00		754.442.630,00		874.738.160,00		
Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	3	3	670.631.101,00	3	690.750.034,00	3	725.287.538,00	3	754.442.630,00	3	874.738.160,00		
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				2.149.185.000,00		2.469.774.633,00		2.400.000.000,00		2.550.000.000,00		2.814.287.738,00		
Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	18	18	2.149.185.000,00	20	2.469.774.633,00	23	2.400.000.000,00	25	2.550.000.000,00	29	2.814.287.738,00	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA				2.149.185.000,00		2.469.774.633,00		2.400.000.000,00		2.550.000.000,00		2.814.287.738,00		
Terlaksananya fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Dukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	0	0	2.149.185.000,00	0	2.469.774.633,00	1	2.400.000.000,00	0	2.550.000.000,00	0	2.814.287.738,00		
	Jumlah terlaksanakanya pendukungn pemasaran ekonomi kreatif (Promosi)	0	3		4		5		5		6			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi	1	0		1		0		1		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Pelaku Ekonomi Kreatif (Laporan)													
	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual (Kegiatan)	1	1		1		1		1		1			
3.26.04.2.02.0003 - Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan				0,00		300.000.000,00		0,00		300.000.000,00		0,00		
Terfasilitasinya Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif (Laporan)	1	0	0,00	1	300.000.000,00	0	0,00	1	300.000.000,00	0	0,00		
3.26.04.2.02.0014 - Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual				149.185.000,00		169.774.633,00		200.000.000,00		250.000.000,00		314.287.738,00		
Terlaksananya dukungan kegiatan untuk perluasan dan penguatan kekayaan intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual (Kegiatan)	1	1	149.185.000,00	1	169.774.633,00	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	1	314.287.738,00		
3.26.04.2.02.0016 - Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah				0,00		0,00		200.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
3.26.04.2.02.0017 - Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif				2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.500.000.000,00		
Terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif (Promosi)	0	3	2.000.000.000,00	4	2.000.000.000,00	5	2.000.000.000,00	5	2.000.000.000,00	6	2.500.000.000,00		
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				1.311.761.250,00		1.095.000.000,00		1.343.013.377,00		1.343.474.950,00		1.700.000.000,00		
Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	7	7	1.311.761.250,00	7,5	1.095.000.000,00	7,7	1.343.013.377,00	7,9	1.343.474.950,00	8	1.700.000.000,00	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				1.311.761.250,00		695.000.000,00		843.013.377,00		843.474.950,00		1.000.000.000,00		
Terlaksananya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	90	200	1.311.761.250,00	220	695.000.000,00	250	843.013.377,00	275	843.474.950,00	300	1.000.000.000,00		
	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	130	150		200		250		250					
	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	0	35		40		45		50		55			
3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				719.668.000,00		445.000.000,00		573.013.377,00		573.474.950,00		700.000.000,00		
Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	0	35	719.668.000,00	40	445.000.000,00	45	573.013.377,00	50	573.474.950,00	55	700.000.000,00		
3.26.05.2.01.0008 - Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI				320.555.000,00		125.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		150.000.000,00		
Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	130	150	320.555.000,00	200	125.000.000,00	250	135.000.000,00	250	135.000.000,00	250	150.000.000,00		
3.26.05.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				271.538.250,00		125.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		150.000.000,00		
Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	90	200	271.538.250,00	220	125.000.000,00	250	135.000.000,00	275	135.000.000,00	300	150.000.000,00		
3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				0,00		400.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		700.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Ekraf di Kota Balikpapan	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	60	0	0,00	120	400.000.000,00	140	500.000.000,00	160	500.000.000,00	180	700.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	30	0	120	140	160	180							
3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				0,00		200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	30	0	0,00	120	200.000.000,00	140	250.000.000,00	160	250.000.000,00	180	350.000.000,00		
3.26.05.2.02.0007 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif				0,00		200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Profesi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	60	0	0,00	120	200.000.000,00	140	250.000.000,00	160	250.000.000,00	180	350.000.000,00		

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA												
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI											
1	Kontribusi penyediaan akomodasi makan dan minum terhadap PDRB (%)	Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten/Kota (harga berlaku) sumber : Juknis LPPD Urusan Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (Juknis LPPD Urusan Pariwisata) atau (nilai tambah penyediaan Akomodasi Makan dan Minum dibagi dengan nilai PDRB ADHB) dikalikan 100  sumber data: BPS	%	1,78	1,78	2,2	2,46	2,72	2,98	3,23	Indikator Tujuan
2	Tingkat Daya Saing Pemuda	"Tingkat daya saing pemuda meliputi : 1. Tingkat daya saing/prestasi pemuda dalam kepemimpinan, Prestasi yg dimaksud adalah Ukuran pencapaian atau sukses yang diraih oleh pemuda dalam melaksanakan peran dan fungsi kepemimpinan, yang terlihat dari posisi strategis yang mereka jalani serta pengaruh positif yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas kepemimpinan mereka.  2. Tingkat daya saing/prestasi pemuda dalam kepeloporan pemuda Prestasi yg dimaksud adalah Ukuran keberhasilan pemuda dalam	Tingkat Daya Saing Pemuda = penjumlahan tingkat daya saing/prestasi pemuda (dalam kepemimpinan, kepeloporan, wirausaha dan organisasi kepemudaan) dibagi dengan total pemuda yang dibina dikalikan 100	%	2,036	2,041	2,046	2,051	2,056	2,061	2,066	Indikator Tujuan

[illegible]

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
		<p>kesuksesan pelaksanaan program, serta dampak positif organisasi terhadap pemuda dan masyarakat.</p> <p>Pemuda yang dibina adalah WNI yang berusia 16-30 tahun dan merupakan binaan perangkat daerah yang membidangi kepemudaan"</p>										
3	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Merujuk kepada Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga. Indeks Pembangunan Olahraga, yang selanjutnya disebut Sport Development Index (SDI) adalah indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan 9 (sembilan) dimensi dasar yaitu: sumber daya manusia	Merujuk kepada Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga atau perubahan/peremutakhirannya	Nilai	0,397	0,397	0,398	0,399	0,4	0,401	0,402	Indikator Tujuan

[illegible]

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
7	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan seberapa baik perangkat daerah tersebut dalam merencanakan melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya.	Diperoleh dari evaluasi yang dilakukan oleh inspektorat daerah (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Nilai Evaluasi AKIP = Nilai komponen perencanaan kinerja+ Nilai komponen pengukuran kinerja+ Nilai Komponen Pelaporan Kinerja+ Nilai Evaluasi Akuntabilitas	Nilai	71,07	71,07	71,2	71,3	71,4	71,5	71,6	Indikator Sasaran
8	Jumlah perolehan medali pada event nasional dan internasional	Mengukur peningkatan prestasi olahraga ( Yang dimaksud dengan peningkatan prestasi olahraga adalah mengikuti beberapa event/pertandingan cabang olahraga dan memperoleh hasil dari cabang olahraga berupa medali. Kegiatan ini tidak dilakukan secara terus menerus, akan tetapi dilaksanakan pada event/pertandingan pada tahun berkenaan.) Sumber : Juknis LPPD Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional (Sumber : Juknis LPPD Urusan Kepemudaan dan Olahraga)	Medali	477	477	250	275	300	375	400	Indikator Sasaran

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
9	Persentase Pertumbuhan Wisatawan	Jumah wisatawan adalah banyaknya wisatawan yang mengunjungi Kota Balikpapan, Jumlah Wisatawan terdiri atas wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	Jumlah kunjungan wisatawan tahunan dikurangi tahun n-1 dibagi jumlah wisatawan tahun n-1 x 100	%	4,37	4,38	4,4	4,42	4,44	4,47	4,49	Indikator Program
10	Jumlah Medali yang Diraih Atlet dan Pegiat Olahraga pada Tingkat Provinsi	Jumlah Medali yang Diraih Atlet dan pegiat olahraga pada tingkat provinsi dalam 1 tahun (Medali)	Jumlah Medali yang Diraih Atlet dan pegiat olahraga pada tingkat provinsi dalam 1 tahun (Medali)	Medali	252	252	500	510	515	520	525	Indikator Program
11	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kompetensinya	- SDM Jasa Pariwisata meliputi seluruh sektor usaha pariwisata yang bersumber dari Ketentuan SKKNI yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi urusan pariwisata dan ekonomi kreatif - SDM Ekonomi Kreatif meliputi seluruh sub sektor ekonomi kreatif berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh K/L yang membidangi Ekonomi kreatif - Peningkatan kompetensi meliputi sosialisasi, workshop, bimtek, diklat, benchmarking dan sertifikasi"	(Jumlah SDM jasa pariwisata dan ekonomi kreatif yang mengikuti peningkatan kualitas/kompetensi) dibagi dengan Jumlah seluruh SDM jasa pariwisata dan ekonomi kreatif	%	7	7	7	7,5	7,7	7,9	8	Indikator Program

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
12	Persentase Pertumbuhan Kualitas Standar Layanan Usaha Destnasi Wisata	Mengukur persentase Kualitas Standar Layanan Usaha Destnasi Wisata berdasarkan Indikator dalam Permenparekr af Nomor 4 Tahun 2021	jumlah nilai tahun n (jumlah total nilai dari tiap destinasi/jumlah destinasi wisata) - jumlah nilai tahun n-1 / n-1 x 100	%	3,8	3,8	3,7	3,6	3,5	3,4	3,3	Indikator Program
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan (IKM) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau penyedia layanan publik	Mengacu kepada peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik dan perubahan/pemutakhirannya	Indeks	87,07	88,18	89,18	89,39	89,59	89,8	90	Indikator Program
14	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda meliputi : 1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kepemimpinan 2. Tingkat partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda 3. Tingkat partisipasi pemuda dalam wirausaha/kegiatan ekonomi mandiri 4. Tingkat partisipasi pemuda dalam Organisasi Kepemudaan  Pemuda yang dibina adalah WNI yang berusia 16-30 tahun dan merupakan binaan perangkat daerah yang	Tingkat Daya Saing Pemuda = penjumlahan tingkat daya saing/partisipasi pemuda (dalam kepemimpinan, kepeloporan, wirausaha dan organisasi kepemudaan) dibagi dengan total pemuda yang dibina dikalikan 100	%	2,28	2,28	2,3	2,32	2,34	2,36	2,38	Indikator Program



NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
		membidangi kepemudaan"										
15	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepramukaan	Derajat keterlibatan aktif pemuda dalam berbagai kegiatan kepramukaan , baik sebagai anggota, pembina, pelatih, andalan, maupun sebagai pendukung kegiatan.	(jumlah anggota pemuda pramuka aktif / jumlah pemuda Kota Balikpapan Usia 16-30 tahun) x 100	%	3,23	3,23	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	Indikator Program
16	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Mengukur proporsi pelaku ekonomi kreatif yang telah mendaftarkan dan memiliki hak kekayaan intelektual (HKI) dari karya atau produk kreatif	( jumlah pelaku ekraf yang memiliki kekayaan intelektual / jumlah total pelaku ekraf ) x 100	Perse ntase	18	18	18	20	23	25	29	Indikator Program
17	Tingkat hunian akomodasi	Mengukur tingkat hunian akomodasi di Kota Balikpapan, Yang dimaksud dengan akomodasi meliputi hotel, pondok wisata, bumi perkemahan,p ersinggahan caravan, apartemen servis, vila, kondominium hotel, hunian wisata senior/lanjut	Jumlah kamar yang terjual dibagi Jumlah kamar yang tersedia dikali 100% ( Sumber : Juknis LPPD Urusan Pariwisata)	%	58,43	58,6	58,75	58,8	58,9	59	59,1	Indikator LPPD

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
		usia dan rumah wisata. (Sumber : Juknis LPPD Urusan Pariwisata)										
18	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (Yang dimaksud dengan pemuda yang berwirausaha adalah pemuda (16-30 tahun) yang terdaftar sebagai pelaku usaha di Lembaga Perizinan Usaha dan Jumlah pemuda 16-30 tahun berdasarkan data kependudukan yang terdaftar pada SIAK - Sumber : Juknis LPPD Urusan Kepemudaan dan Olahraga)	(Jumlah pemuda (16-30 tahun)yang berwirausaha di kabupaten/kota dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun)di kabupaten/kota dikali 100% sumber : Juknis LPPD Urusan Kepemudaan dan Olahraga	% Nilai	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	Indikator LPPD
19	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah perjalanan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan tujuan utama berwisata, bukan untuk bekerja atau sekolah, dalam periode tertentu (biasanya 1 tahun).	Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Destinasi, MICE, hunian	Orang	2.633.919	2.746.019	2.863.219	2.985.719	3.113.719	3.247.519	3.387.519	Indikator SDGs

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
20	Jumlah wisatawan mancanegara	Jumlah kedatangan orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan tujuan utama berwisata dan tinggal sementara, tidak bermaksud menetap, dalam periode tertentu.	Kunjungan Wisatawan Mancanegara melalui pintu masuk (udara, laut, darat)	Orang	36.450	41.250	46.685	52.845	59.820	67.720	76.670	Indikator SDGs
21	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota	Mengukur pertumbuhan wisatawan nusantara yang datang ke Kota Balikpapan, Data yang digunakan adalah angka total wisatawan nusantara yang masuk ke Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan wisatawan adalah setiap pengunjung yang melakukan perjalanan ke suatu tempat kurang dari satu tahun didorong untuk oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur atau tujuan pribadi lainnya selain untuk bekerja) yang tinggal paling sedikit 24 jam (Sumber : Juknis LPPD Urusan Pariwisata)	Jumlah wisatawan tahun n dikurang Jumlah wisatawan tahun n-1 dibagi Jumlah wisatawan tahun n-1 dikali 100%	%	3,94	3,95	3,96	3,97	3,98	3,99	4	Indikator LPPD

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
22	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Kontribusi pariwisata terhadap PDB didefinisikan : sebagai:a. Dari sisi produksi merupakan persentase rasio nilai tambah sektor-sektor terkait pariwisata terhadap total PDB (harga berlaku);  b. Dari sisi pengeluaran merupakan persentase rasio penjumlahan pengeluaran ekonomi untuk pariwisata terhadap total PDB (harga berlaku).	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB diperoleh dari membagi penjumlahan pengeluaran ekonomi untuk pariwisata yang terdiri dari konsumsi wisatawan nusantara, pengeluaran pemerintah untuk pariwisata, investasi pariwisata, dan ekspor netto jasa perjalanan (ekspor jasa perjalanan dikurangi impor jasa perjalanan) dengan PDB pada harga berlaku, dikalikan dengan 100 persen.	(%)	1	1,08	1,17	1,25	1,33	1,42	1,5	Indikator SDGs
23	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten/Kota (harga berlaku) (Sumber : Juknis LPPD Urusan Pariwisata)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (Sumber : Juknis LPPD Urusan Pariwisata)	%	34,33	34,48	34,63	34,78	34,93	35,08	35,23	Indikator LPPD
24	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasi kemasyarakatan	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial (sumber : Juknis LPPD Urusan Kepemudaan dan Olahraga)	(Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat di kabupaten/kota dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota dikali 100% sumber : Juknis LPPD Urusan Kepemudaan dan Olahraga	%	9,07	9,07	9,07	9,07	9,08	9,08	9,08	Indikator LPPD

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
25	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Mengukur tingkat pertumbuhan wisatawan mancanegara yang masuk ke kota Balikpapan, Data yang digunakan adalah angka total wisatawan mancanegara yang masuk ke Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan wisatawan adalah setiap pengunjung yang melakukan perjalanan ke suatu tempat kurang dari satu tahun didorong untuk oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur atau tujuan pribadi lainnya selain untuk bekerja) yang tinggal paling sedikit 24 jam (Sumber : Juknis LPPD Urusan Pariwisata)	Jumlah wisatawan tahun n dikurang Jumlah wisatawan tahun n-1 dibagi Jumlah wisatawan tahun n-1 dikali 100% ( Sumber : Juknis LPPD Urusan Pariwisata)	%	48,7	48,71	48,72	48,73	48,74	48,75	48,76	Indikator LPPD

Tabel 4. 4 Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas  
Pembangunan Daerah

N O	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGA N
-1	-2	-3	-4	-5
<b>2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA</b>				
1.	2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraa n pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			2.19.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			2.19.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			2.19.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			2.19.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			2.19.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			2.19.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.19.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			2.19.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

<b>N O</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGA N</b>
-1	-2	-3	-4	-5
			2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.19.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			2.19.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
			2.19.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			2.19.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
			2.19.02.2.01.0010 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	
			2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	
			2.19.02.2.01.0012 - Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	
			2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
			2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
3.	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya	2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

<b>N O</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGA N</b>
-1	-2	-3	-4	-5
	SAING KEOLAHRAGAAN	Saing Keolahragaan		
			2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
			2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
			2.19.03.2.03.0007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
			2.19.03.2.03.0008 - Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )	
			2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
			2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
			2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	
			2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
			2.19.03.2.05.0009 - Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	
			2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	
4.	2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan	2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
			2.19.04.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	
5.	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Balikpapan Kota MICE dan Wisata



<b>N O</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGA N</b>
-1	-2	-3	-4	-5
			3.26.02.2.02.0002 - Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Balikpapan Kota MICE dan Wisata
			3.26.02.2.02.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Balikpapan Kota MICE dan Wisata
			3.26.02.2.02.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Balikpapan Kota MICE dan Wisata
			3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Balikpapan Kota MICE dan Wisata
			3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Balikpapan Kota MICE dan Wisata
			3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Balikpapan Kota MICE dan Wisata
			3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan Kota MICE dan Wisata
			3.26.02.2.04.0012 - Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Balikpapan Kota MICE dan Wisata
6.	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Balikpapan Kota MICE dan Wisata
			3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Balikpapan Kota MICE dan Wisata
			3.26.03.2.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Balikpapan Kota MICE dan Wisata
			3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Balikpapan Kota MICE dan Wisata
7.	3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Balikpapan Kota Kreatif dan Inovatif
			3.26.04.2.02.0014 - Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Balikpapan Kota Kreatif dan Inovatif
			3.26.04.2.02.0017 - Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	Balikpapan Kota Kreatif dan Inovatif

N O	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGA N
-1	-2	-3	-4	-5
8.	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Balikpapan Kota Kreatif dan Inovatif
			3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Balikpapan Kota Kreatif dan Inovatif
			3.26.05.2.01.0008 - Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Balikpapan Kota Kreatif dan Inovatif
			3.26.05.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Balikpapan Kota Kreatif dan Inovatif
			3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Balikpapan Kota Kreatif dan Inovatif
			3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Balikpapan Kota Kreatif dan Inovatif
			3.26.05.2.02.0007 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Balikpapan Kota Kreatif dan Inovatif

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA										
1	Kontribusi penyediaan akomodasi makan dan minum terhadap PDRB (%)	%	1,78	1,78	2,2	2,46	2,72	2,98	3,23	Indikator Tujuan
2	Tingkat Daya Saing Pemuda	%	2,036	2,041	2,046	2,051	2,056	2,061	2,066	Indikator Tujuan
3	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Nilai	0,397	0,397	0,398	0,399	0,4	0,401	0,402	Indikator Tujuan
4	Jumlah perolehan medali pada event nasional dan internasional	Medali	477	477	250	275	300	375	400	Indikator Sasaran
5	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,07	71,07	71,2	71,3	71,4	71,5	71,6	Indikator Sasaran

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
6	Jumlah Nilai Investasi Ekonomi Kreatif	Milyar Rupiah	-	-	1,12	1,37	1,62	1,87	2,12	Indikator Sasaran
7	Persentase pemuda yang memiliki kompetensi melalui sertifikasi	%	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	Indikator Sasaran
8	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,64	1,65	1,67	1,71	1,75	1,78	1,8	Indikator Sasaran

Berikut merupakan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) selama periode 2021-2024. Pembahasan mencakup identifikasi keberhasilan, tantangan yang dihadapi, serta pembelajaran penting yang dapat ditarik. Analisis ini menjadi fondasi kuat untuk perumusan strategi dan target IKK LPPD yang lebih efektif dan relevan dalam Renstra 2026-2029, demi peningkatan berkelanjutan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	STATUS	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2			-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
1	Tingkat Daya Saing Pemuda	"Tingkat daya saing pemuda meliputi : 1. Tingkat daya saing/prestasi pemuda dalam kepemimpinan Prestasi yg dimaksud adalah Ukuran pencapaian atau sukses yang diraih oleh pemuda dalam melaksanakan peran dan fungsi kepemimpinan, yang terlihat dari posisi strategis yang mereka jalani serta pengaruh positif yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas kepemimpinan mereka.  2. Tingkat daya saing/prestasi pemuda dalam kepelop	Tingkat Daya Saing Pemuda = penjumlahan tingkat daya saing/prestasi pemuda (dalam kepemimpinan, wirausaha dan organisasi kepemudaan) dibagi dengan total pemuda yang dibina dikalikan 100	positif	%	2,036	2,041	2,046	2,051	2,056	2,061	2,066	Indikator Tujuan

[illegible]

[illegible]

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	STATUS	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2			-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		dan masyarakat.  Pemuda yang dibangun adalah WNI yang berusia 16-30 tahun dan merupakan binaan perangkat daerah yang membidangi kepemudaan"											
2	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Merujuk kepada Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga. Indeks Pembangunan Olahraga, yang selanjutnya disebut Sport	Merujuk kepada Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga atau perubahan/pemutakhirannya	positif	Nilai	0,397	0,397	0,398	0,399	0,4	0,401	0,402	Indikator Tujuan

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	STATUS	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2			-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Development Index (SDI) adalah indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan 9 (sembilan) dimensi dasar yaitu: sumber daya manusia (SDM) olahraga, ruang terbuka, literasi fisik, partisipasi, kebugaran, perkembangan personal, kesehatan, ekonomi, dan performa.											
3	Jumlah perolehan medali pada event nasional dan internasional	Mengukur peningkatan prestasi olahraga ( Yang dimaksud dengan peningkatan prestasi olahraga adalah mengikuti beberapa event/pertandingan cabang olahraga dan memperoleh hasil	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional (Sumber : Juknis LPPD Urusan Kepemudaan dan Olahraga)	positif	Medali	477	477	250	275	300	375	400	Indikator Sasaran



NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	STATUS	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2			-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		dari cabang olahraga berupa medali. Kegiatan ini tidak dilakukan secara terus menerus, akan tetapi dilaksanakan pada event/pertandingan pada tahun berkenaan.) Sumber : Juknis LPPD Urusan Kepemudaan dan Olahraga											
4	Nilai AKIP Peringkat Daerah	Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan seberapa baik perangkat daerah tersebut	Diperoleh dari evaluasi yang dilakukan oleh inspektorat daerah (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Nilai Evaluasi AKIP = Nilai komponen perencanaan kinerja+ Nilai komponen pengukuran kinerja+ Nilai Komponen Pelaporan Kinerja+ Nilai Evaluasi Akuntabilitas	positif	Nilai	71,07	71,07	71,2	71,3	71,4	71,5	71,6	Indikator Sasaran dan LPPD

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	STATUS	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2			-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		t dalam merencanakan melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya.											
5	Persentase pemuda yang memiliki kompetensi melalui sertifikasi	Persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang memiliki kompetensi melalui sertifikasi	Jumlah pemuda berusia 16-30 tahun yang memiliki kompetensi melalui sertifikasi dibagi dengan jumlah pemuda berusia 16-30 tahun dikalikan 100%	positif	%	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	Indikator Sasaran
6	Jumlah Medali yang Diraih Atlet dan Pegiat Olahraga pada Tingkat Provinsi	Jumlah Medali yang Diraih Atlet dan pegiat olahraga pada tingkat provinsi dalam 1 tahun (Medali)	Jumlah Medali yang Diraih Atlet dan pegiat olahraga pada tingkat provinsi dalam 1 tahun (Medali)	positif	Medali	252	252	500	510	515	520	525	Indikator Program

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	STATUS	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2			-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Peringkat Daerah	Indeks Kepuasan (IKM) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau penyedia layanan publik	Mengacu kepada peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik dan perubahan/pemutakhirannya	positif	Indeks	87,07	88,18	89,18	89,39	89,59	89,8	90	Indikator Program
8	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda meliputi : 1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kepemimpinan 2. Tingkat partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda 3. Tingkat partisipasi pemuda dalam wirausaha/kegiatan ekonomi mandiri 4. Tingkat partisipasi pemuda dalam Organisasi Kepemudaan Pemuda	Tingkat Daya Saing Pemuda = penjumlahan tingkat daya saing/partisipasi pemuda (dalam kepemimpinan, kepeloporan, wirausaha dan organisasi kepemudaan) dibagi dengan total pemuda yang dibina dikalikan 100	positif	%	2,28	2,28	2,3	2,32	2,34	2,36	2,38	Indikator Program

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	STATUS	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2			-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		yang dibina adalah WNI yang berusia 16-30 tahun dan merupakan binaan perangkat daerah yang membidangi kepemudaan"											
9	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepramukaan	Derajat keterlibatan aktif pemuda dalam berbagai kegiatan kepramukaan, baik sebagai anggota, pembina, pelatih, andalan, maupun sebagai pendukung kegiatan.	(jumlah anggota pemuda pramuka aktif / jumlah pemuda Kota Balikpapan Usia 16-30 tahun) x 100	positif	%	3,23	3,23	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	Indikator Program
10	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasi kemasyarakatan	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial (sumber : Juknis LPPD Urusan Kepemudaan dan Olahraga)	(Jumlah pemuda (16-30 tahun)yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun)di kabupaten/kota dikali 100% sumber : Juknis LPPD Urusan Kepemudaan dan Olahraga	positif	%	9,07	9,07	9,07	9,07	9,08	9,08	9,08	Indikator LPPD

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	STATUS	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2			-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
11	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (Yang dimaksud dengan pemuda yang berwirausaha adalah pemuda (16-30 tahun) yang terdaftar sebagai pelaku usaha di Lembaga Perizinan Usaha dan Jumlah pemuda 16-30 tahun berdasarkan data kependudukan yang terdaftar pada SIAK - Sumber : Juknis LPPD Urusan Kepemudaan dan Olahraga)	(Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota dikali 100% sumber : Juknis LPPD Urusan Kepemudaan dan Olahraga	positif	% Nilai	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	Indikator LPPD
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	STATUS	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2			-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	Kontribusi penyediaan akomodasi makan dan minum terhadap PDRB (%)	Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten/Kota (harga berlaku) sumber : Juknis LPPD Urusan Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (Juknis LPPD Urusan Pariwisata) atau (nilai tambah penyediaan Akomodasi Makan dan Minum dibagi dengan nilai PDRB ADHB) dikalikan 100  sumber data: BPS	positif	%	1,78	1,78	2,2	2,46	2,72	2,98	3,23	Indikator Tujuan dan LPPD
2	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Ukuran rata-rata jumlah hari yang dihabiskan oleh wisatawan selama kunjungannya di destinasi wisata Kota Balikpapan dalam 1 tahun	Jumlah Hari Wisatawan Menginap / Jumlah Wisatawan yang Menginap di Kota Balikpapan dalam periode 1 (satu) tahun	positif	Hari	1,64	1,65	1,67	1,71	1,75	1,78	1,8	Indikator Sasaran
3	Jumlah Nilai Investasi Ekonomi Kreatif	Nilai Investasi Ekonomi Kreatif adalah nilai yang dihasilkan dari Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing pada produksi ekonomi kreatif dalam 1 tahun (Rupiah)	Nilai Investasi Ekonomi Kreatif = $\sum$ nilai investasi cakupan aktivitas ekonomi kreatif dalam 17 Sub Sektor Ekraf	positif	Milyar Rupiah	-	-	1,12	1,37	1,62	1,87	2,12	Indikator Sasaran

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	STATUS	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2			-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
4	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Mengukur proporsi pelaku ekonomi kreatif yang telah mendaf tarkan dan memilik i hak kekayaan intelektual (HKI) dari karya atau produk kreatif	( jumlah pelaku ekraf yang memiliki kekayaan intelektual / jumlah total pelaku ekraf ) x 100	positif	Perse ntase	18	18	18	20	23	25	29	Indikator Program
5	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kompetensinya	- SDM Jasa Pariwisata meliputi seluruh sektor usaha pariwisata yang bersumber dari Ketentuan SKKNI yang ditetapkan oleh Kement erian yang membidangi urusan pariwisata dan ekonomi kreatif - SDM Ekonomi Kreatif meliputi seluruh sub sektor ekonomi kreatif berdas arkan ketentuan yang ditetapkan oleh K/L yang membidangi Ekono	(Jumlah SDM jasa pariwisata dan ekonomi kreatif yang mengikuti peningkatan kualitas/kompet ensi) dibagi dengan Jumlah seluruh SDM jasa pariwisata dan ekonomi kreatif	positif	%	7	7	7	7,5	7,7	7,9	8	Indikator Program

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	STATUS	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2			-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		mi kreatif - Peningkatan kompetensi meliputi sosialisasi, workshop, bimtek, diklat, benchmarking dan sertifikasi"											
6	Persentase Pertumbuhan Kualitas Standar Layanan Usaha Destinasi Wisata	Mengukur persentase Kualitas Standar Layanan Usaha Destinasi Wisata berdasarkan Indikator dalam Permenparekra f Nomor 4 Tahun 2021	jumlah nilai tahun n (jumlah total nilai dari tiap destinasi/jumlah destinasi wisata) - jumlah nilai tahun n-1 / n-1 x 100	negatif	%	3,8	3,8	3,7	3,6	3,5	3,4	3,3	Indikator Program
7	Persentase Pertumbuhan Wisatawan	Jumah wisatawan adalah banyaknya wisatawan yang mengunjungi Kota Balikpapan, Jumlah Wisatawan terdiri atas wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	Jumlah kunjungan wisatawan tahun n dikurangi tahun n-1 dibagi jumlah wisatawan tahun n-1 x 100	positif	%	4,37	4,38	4,4	4,42	4,44	4,47	4,49	Indikator Program



NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	STATUS	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2			-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
8	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah perjalanan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan tujuan utama berwisata, bukan untuk bekerja atau sekolah, dalam periode tertentu (biasanya 1 tahun).	Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Destinasi, MICE, hunian	positif	Orang	2.633.919	2.746.019	2.863.219	2.985.719	3.113.719	3.247.519	3.387.519	Indikator SDGs
9	Jumlah wisatawan mancanegara	Jumlah kedatangan orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan tujuan utama berwisata dan tinggal sementara, tidak bermaksud menetap, dalam periode tertentu.	Kunjungan Wisatawan Mancanegara melalui pintu masuk (udara, laut, darat)	positif	Orang	36.450	41.250	46.685	52.845	59.820	67.720	76.670	Indikator SDGs
10	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten/Kota	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (Sumber : Juknis LPPD Urusan Pariwisata)	positif	%	34,33	34,48	34,63	34,78	34,93	35,08	35,23	Indikator LPPD

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	STATUS	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2			-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		(harga berlaku) (Sumber : Juknis LPPD Urusan Pariwisata)											
11	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota	Mengukur pertumbuhan wisatawan nusantara yang datang ke Kota Balikpapan, Data yang digunakan adalah angka total wisatawan nusantara yang masuk ke Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan wisatawan adalah setiap pengunjung yang melakukan perjalanan ke suatu tempat kurang dari satu tahun didorong untuk oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur atau tujuan pribadi lainnya selain untuk bekerja) yang tinggal	Jumlah wisatawan tahun n dikurang Jumlah wisatawan tahun n-1 dibagi Jumlah wisatawan tahun n-1 dikali 100%	positif	%	3,94	3,95	3,96	3,97	3,98	3,99	4	Indikator LPPD

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	STATUS	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2			-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		paling sedikit 24 jam (Sumber : Juknis LPPD Urusan Pariwisata)											
12	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Mengukur tingkat pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke kota Balikpapan, Data yang digunakan adalah angka total wisatawan mancanegara yang masuk ke Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan wisatawan adalah setiap pengunjung yang melakukan perjalanan ke suatu tempat kurang dari satu tahun didorong untuk oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur atau tujuan	Jumlah wisatawan tahun n dikurang Jumlah wisatawan tahun n-1 dibagi Jumlah wisatawan tahun n-1 dikali 100% ( Sumber : Juknis LPPD Urusan Pariwisata)	positif	%	48,7	48,71	48,72	48,73	48,74	48,75	48,76	Indikator LPPD

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	STATUS	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2			-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		pribadi lainnya selain untuk bekerja) yang tinggal paling sedikit 24 jam (Sumber : Juknis LPPD Urusan Pariwisata)											
13	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	<p>Kontribusi pariwisata terhadap PDB didefinisikan : sebagai :</p> <p>a. Dari sisi produksi merupakan persentase rasio nilai tambah sektor-sektor terkait pariwisata terhadap total PDB (harga berlaku);</p> <p>b. Dari sisi pengeluaran merupakan persentase rasio penjumlahan pengeluaran ekonomi untuk pariwisata terhadap total PDB (harga berlaku).</p>	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB diperoleh dari pembagian penjumlahan pengeluaran ekonomi untuk pariwisata yang terdiri dari konsumsi wisatawan nusantara, pengeluaran pemerintah untuk pariwisata, investasi pariwisata, dan ekspor netto jasa perjalanan (ekspor jasa perjalanan dikurangi impor jasa perjalanan) dengan PDB pada harga berlaku, dikalikan dengan 100 persen.	positif	(%)	1	1,08	1,17	1,25	1,33	1,42	1,5	Indikator SDGs

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	STATUS	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2			-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
14	Tingkat hunian akomodasi	Mengukur tingkat hunian akomodasi di Kota Balikpapan, Yang dimaksud dengan akomodasi meliputi hotel, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan caravan, apartemen servis, vila, kondominium hotel, hunian wisata senior/lanjut usia dan rumah wisata. (Sumber : Juknis LPPD Urusan Pariwisata)	Jumlah kamar yang terjual dibagi Jumlah kamar yang tersedia dikali 100% ( Sumber : Juknis LPPD Urusan Pariwisata)	positif	%	58,43	58,6	58,75	58,8	58,9	59	59,1	Indikator LPPD

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan berfungsi sebagai panduan utama kami dalam merencanakan program dan kegiatan kepemudaan, keolahragaan, serta pariwisata selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merumuskan aspirasi kami untuk memajukan sektor-sektor tersebut di Kota Balikpapan. Keberhasilan yang telah dicapai sebelumnya adalah cerminan dari dedikasi dan sinergi yang kuat antar dinas terkait di tingkat kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan. Kami berharap Renstra ini dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan kepemudaan, olahraga, dan pariwisata di Balikpapan.

Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata memegang posisi krusial dalam kerangka pembangunan Pemerintah Kota Balikpapan. Sebagai turunan dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta rencana anggaran dan program kerja dinas untuk jangka waktu lima tahun. Penyusunannya berpegang teguh pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 menjadi referensi utama bagi penyusunan berbagai dokumen perencanaan lainnya. Ini termasuk Rencana Kerja Tahunan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan sejenisnya, demi menjamin konsistensi dan akuntabilitas. Perangkat Daerah Kota Balikpapan berkewajiban melaksanakan program-program yang termuat dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, melalui kolaborasi aktif dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, masyarakat, serta sektor usaha.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah suatu dokumen Perencanaan yang disusun oleh setiap perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta menjalankan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Dokumen ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah, serta acuan dalam penilaian kinerja Perangkat Daerah.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah:

- a. Memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas, baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang;
- b. Dapat mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai;
- c. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas;
- d. Menjadi alat/media untuk berkoordinasi dengan pihak lain;
- e. Mempermudah pencapaian target, strategi, dan penggunaan sumber daya.

Penyusunan Renstra perangkat daerah harus sesuai RPJMD. Sasaran RPJMD setelah diterjemahkan kedalam strategi dan program Perangkat Daerah harus terhubung dengan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan Perangkat Daerah berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah. Renstra Perangkat Daerah juga harus diselaraskan dengan Renstra Kementerian Lembaga (K/L). Renstra sebagai rencana pembangunan lima tahunan, selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja Perangkat Daerah mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah yang dirangkum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus diselaraskan dengan Renstra. Renja yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. RKA SKPD inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA SKPD ini akan menjadi dasar ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Visi dan Misi Wali Kota Balikpapan Periode 2025–2029 adalah Balikpapan Kota Global, Nyaman untuk semua dalam Bingkai Madinatul Iman. Untuk mewujudkan Visi di atas, maka telah ditetapkan 5 (lima) misi, yakni :

1. Membangun dan Mengembangkan Pemerintah yang Bersih dan Profesional yang Berorientasi Pada Pelayanan Masyarakat;
2. Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur yang Bisa Memenuhi Seluruh Kebutuhan Masyarakat Balikpapan;
3. Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan Terdidik;
4. Mengembangkan Perekonomian yang Tumbuh Berkeadilan untuk Manusia;
5. Konsisten Menjaga Lingkungan Hidup yang Sehat dan Nyaman untuk Semua.

Dari uraian Visi dan Misi Wali Kota Balikpapan periode tahun 2025–2029 ini terdapat 9 (Sembilan) Prioritas Wali Kota terpilih yang akan dijalankan, yaitu :

1. Transformasi Birokrasi;
2. Penyediaan air bersih yang sehat dan merata;
3. Lingkungan hidup yang sehat dan nyaman;
4. Balikpapan terang;
5. Balikpapan kota inovatif dan kreatif;
6. Mengatasi stunting;
7. Balikpapan Kota Ramah Anak;
8. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan
9. Balikpapan Kota MICE dan Wisata

Dari uraian visi dan misi Wali Kota Balikpapan periode tahun 2025–2029 dapat ditelaah dimana 1 (satu) dari 5 (lima) misi yang ada dalam dokumen RPJMD Kota Balikpapan periode Tahun 2025–2029 tersebut sangat relevan atau berkaitan secara eksplisit dengan 2 (dua) urusan yang diamanahkan untuk ditangani oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, terdapat pada misi ketiga RPJMD Kota Balikpapan tersebut yaitu **“Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan Terdidik”**.

Dalam upaya mewujudkan Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Periode Tahun 2025–2029 tersebut di atas serta sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ditegaskan dalam ketentuan dimaksud bahwa pimpinan Perangkat Daerah berkewajiban menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Di samping itu, di dalam Bagian Kedua pasal 6 ayat 2, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga ditegaskan tentang kewajiban Satuan Perangkat Daerah untuk menyusun/mempunyai rencana strategis tentang program-program utama yang akan dicapai selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Ketentuan-ketentuan inilah yang mendasari dan melatarbelakangi penyusunan dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan periode Tahun 2025–2029.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774)
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;



8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
33. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
34. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
35. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043;
36. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
37. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
38. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
39. **Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Perpustakaan Dan Arsip.**
40. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
41. **Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor ... Tahun 2025**

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan ditetapkan dengan maksud:

1. Menjadi dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
2. Penentuan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
3. Menjadi dasar atau tolok ukur dalam penilaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah:

1. Terlaksananya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
2. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

3. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan di Balikpapan.
4. Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **Bab I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

#### **Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi gambaran pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan yang memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, kinerja pelayanan sampai saat ini, Permasalahan yang dihadapi dan isu strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan.

#### **Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan arah kebijakan pembangunan pemerintah bidang urusan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan.

#### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan ini memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka mengembangkan otonomi daerah. Dalam peranannya sebagai pelaksana Urusan Wajib Perpustakaan, lembaga harus siap untuk mencerdaskan bangsa melalui bahan bacaan atau *literature* yang terseleksi dan *up to date*. Dalam peranannya sebagai pelaksana Urusan Wajib Kearsipan, lembaga harus siap menampung, menyimpan, memelihara serta mengamankan arsip-arsip statis yang memiliki nilai sejarah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, serta tidak kalah pentingnya Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan sebagai lembaga yang harus memberikan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan penataan kearsipan di Kota Balikpapan.

#### **2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan di bidang kearsipan.

Dalam melaksanakan tugas di atas Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program urusan bidang perpustakaan dan kearsipan;
2. Perumusan kebijakan teknis urusan bidang perpustakaan dan kearsipan;
3. Pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan bahan pustaka;
4. Pembinaan perpustakaan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan dan pengelolaan urusan perpustakaan dan kearsipan pada lingkup perangkat daerah dan perpustakaan di lingkungan daerah;
6. Pengelolaan arsip inaktif dan statis;
7. Pembinaan kearsipan pada pencipta arsip pada tingkat daerah;
8. Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dokumen/arsip dan bahan pustaka sebagai warisan budaya;
9. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan arsip pada perangkat daerah;
10. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja urusan bidang perpustakaan dan kearsipan;
11. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
13. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

##### **2.1.2. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas**

Kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah di bidang perpustakaan dan kearsipan. Kemudian memiliki fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran Dinas Perpustakaan dan Arsip
- b. pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Dinas Perpustakaan dan Arsip;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusan perpustakaan dan kearsipan;
- d. pelaksanaan urusan perpustakaan dan kearsipan di Daerah;
- e. penyediaan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan;
- f. pemberian dukungan teknis kepada perangkat daerah, kelurahan, badan usaha milik daerah, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat di bidang kearsipan;
- g. perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- h. perumusan kebijakan sistem informasi daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- i. pembinaan kearsipan kepada perangkat daerah, kelurahan, badan usaha milik daerah, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan;
- j. penyelenggaraan perpustakaan Daerah;
- k. pembinaan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca di Daerah;
- l. melakukan pengawasan sistem kearsipan eksternal terhadap badan usaha milik Daerah;
- m. melakukan pengawasan sistem kearsipan internal terhadap seluruh Perangkat Daerah; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

### **2.1.3. Tugas dan Fungsi Sekretariat**

Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip sesuai tugas dan fungsinya serta melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip.

Sekretariat mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Dinas Perpustakaan dan Arsip;
2. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, perpustakaan dan dokumentasi Dinas Perpustakaan dan Arsip;
3. pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pengelolaan survei kepuasan masyarakat;
4. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas Perpustakaan dan Arsip;
5. pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;
6. pelaksanaan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya;
7. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta *monitoring* dan evaluasi pencapaian kinerja;

8. melakukan pengurusan dan pengendalian naskah dinas, pembinaan dan evaluasi pengelolaan arsip aktif di unit pengolah;
9. melakukan penataan, penyimpanan, pemeliharaan, pengolahan dan penyajian arsip dinamis menjadi informasi publik, serta penyusutan arsip dan penyerahan arsip statis; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, pengelolaan survei kepuasan masyarakat, tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- b. pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, serta layanan pengadaan barang/jasa;
- d. pengelolaan aset;
- e. penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi;
- f. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara;
- g. pengembangan kompetensi aparatur sipil negara;
- h. penyiapan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya;
- i. penyusunan informasi dan dokumentasi serta pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

#### **2.1.4. Tugas dan Fungsi Bidang Perpustakaan**

Bidang Perpustakaan mempunyai tugas Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perpustakaan, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan penyusunan standar teknis bidang perpustakaan;
- b. pelaksanaan pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan meliputi penyusunan kebijakan pengembangan koleksi, seleksi, pengadaan bahan perpustakaan, inventarisasi, pengembangan koleksi daerah (*local content*), pelaksana kajian kebutuhan pemustaka, deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek, penyelesaian fisik bahan perpustakaan, verifikasi, validasi dan pemasukan data ke pangkalan data;
- c. pelaksanaan layanan, otomasi, dan kerja sama perpustakaan meliputi layanan sirkulasi, rujukan, literasi informasi, bimbingan pemustaka, dan layanan ekstensi (perpustakaan keliling, pojok baca, dan sejenisnya), promosi layanan, pelaksanaan kajian kepuasan pemustaka, pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi perpustakaan, pengelolaan *website* dan jaringan perpustakaan serta pelaksanaan kerja sama antar perpustakaan dan membangun jejaring perpustakaan;
- d. pelaksanaan pelestarian bahan perpustakaan meliputi konservasi melakukan pelestarian fisik bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui perawatan, restorasi, dan penjilidan serta pembuatan sarana penyimpanan bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui ahli media, pemeliharaan serta penyimpanan master informasi digital;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan sesuai dengan kewenangan Daerah, implementasi norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), pendataan perpustakaan, dan masyarakatan/sosialisasi, serta evaluasi pengembangan perpustakaan;

- f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan meliputi pendataan tenaga perpustakaan, bimbingan teknis, peningkatan kemampuan teknis kepustakawanan, penilaian angka kredit pustakawan, koordinasi pengembangan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, pemasyarakatan/sosialisasi, serta evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan;
- g. pelaksanaan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca meliputi pengkajian, dan pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca, koordinasi, pemasyarakatan/sosialisasi, dan bimbingan teknis serta evaluasi kegemaran membaca; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.5. Tugas dan Fungsi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan**

Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan. Kemudian mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan, **penyusunan standar teknis, rencana dan program** bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan kearsipan;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kearsipan;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan kearsipan;
- e. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi dan sosialisasi penyelenggaraan kearsipan;
- f. **pelaksanaan** pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan;
- g. pelaksanaan perencanaan program pengawasan kearsipan;
- h. pelaksanaan audit, penilaian dan pemantauan hasil pengawasan kearsipan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.6. Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Arsip**

Bidang Pengelolaan Arsip mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis. Kemudian mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan, **penyusunan standar teknis, rencana dan program** bidang pengelolaan arsip;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan arsip dinamis;
- c. pelaksanaan alih media dan reproduksi arsip **dinamis**;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan arsip statis;
- e. pelaksanaan usulan pemusnahan **arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun** dan akuisisi arsip;
- f. pelaksanaan pengolahan arsip **statis**;
- g. pelaksanaan preservasi arsip **statis**;
- h. **pelaksanaan evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana**;
- i. pelaksanaan perizinan penggunaan arsip; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya

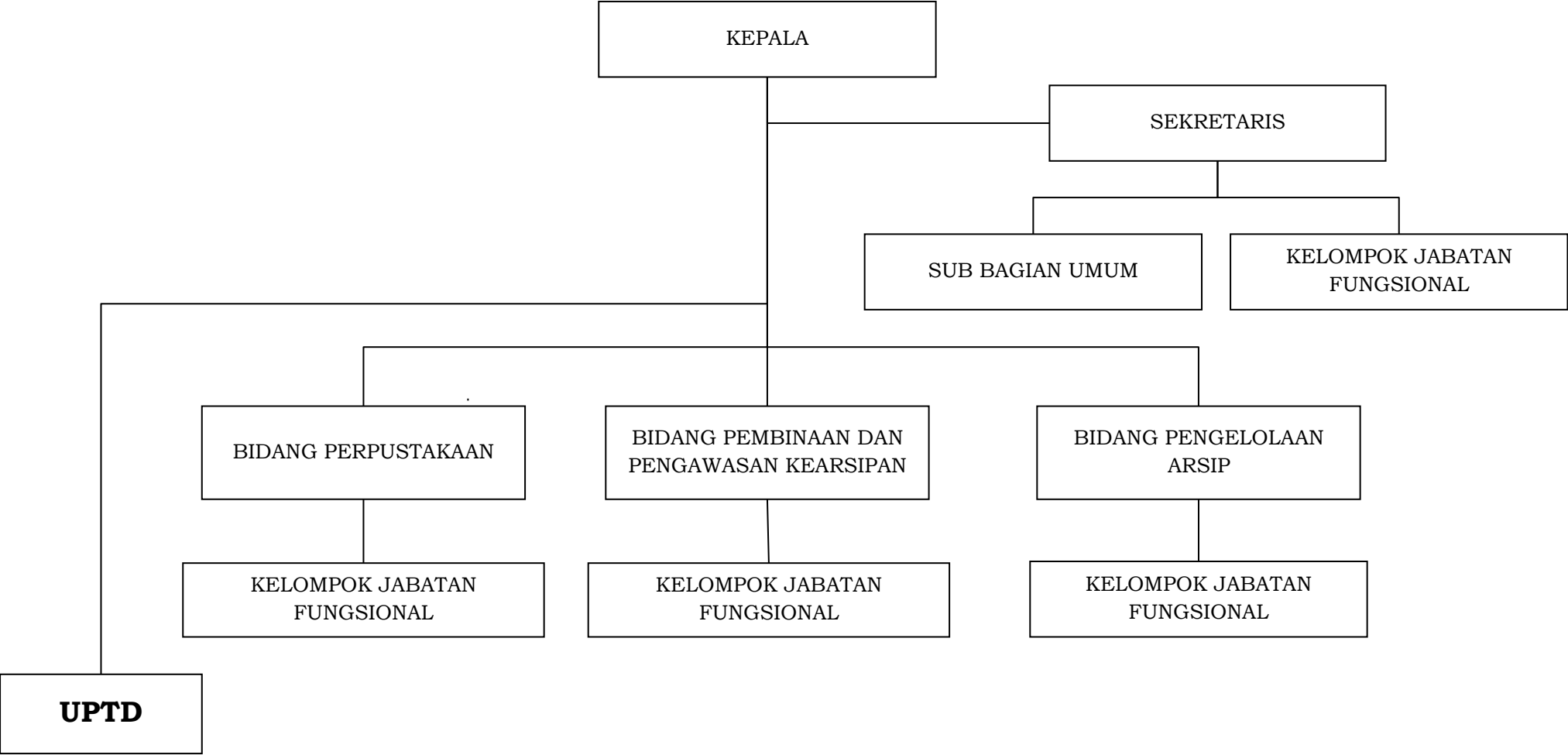
#### **2.1.7. Struktur Organisasi**

Gambar Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang

kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana terlampir dalam Lampiran XXI adalah sebagai berikut:



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BALIKPAPAN**  
**BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN NOMOR ..... TAHUN 2025 TANGGAL..... 2025**



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan didukung Sumber Daya Manusia sebanyak 42 orang ASN dan 6 orang Tenaga Non ASN sampai dengan Agustus 2025. Berikut data pegawai berdasarkan pangkat/golongan dan tingkat pendidikan:

Tabel 2. 1 Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	ASN (orang)		Non ASN (orang)		Jumlah	Keterangan
		L	P	L	P		
1	Pascasarjana/S2	1	1			2	
2	Sarjana/S1	2	7	-	4	13	
3	Diploma IV	2	-			2	
4	Diploma III	2	8			8	
5	Diploma II	-	-			0	
6	Diploma I	-	-			0	
7	SLTA	6	12	1	1	20	
8	SLTP	1				1	
	Jumlah	14	28	1	5	48	

Tabel 2. 2 Pegawai PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat/Golongan	L	P	Jumlah	Keterangan
1	Pembina Utama Muda/IVc	1	0	1	
2	Pembina Tk.I/IVb	0	1	1	
3	Pembina/IVa	0	2	2	
4	Penata Tk.I/IIIId	0	3	3	
5	Penata/IIIc	0	3	3	
6	Penata Muda Tk.I/IIIb	1	4	5	
7	Penata Muda/IIIa	4	4	8	
8	Pengatur Tk.I/IId	1	0	1	
9	Pengatur/IIC	1	2	3	
10	Pengatur Muda/IIa	1	0	1	
	Jumlah	8	20	28	

Tabel 2. 3 Pegawai PPPK Berdasarkan Golongan

No	Pangkat/Golongan	L	P	Jumlah	Keterangan
1	Golongan IX	1	1	2	
2	Golongan VII	0	1	1	
3	Golongan V	4	6	10	
	Jumlah	5	8	14	

Tabel 2. 4 Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	L	P	Jumlah	Keterangan
1	Struktural	1	4	5	
2	Pustakawan	1	5	6	
3	Arsiparis	3	6	9	
4	Pranata Komputer	-	1	1	
5	Fungsional Umum	9	12	21	
	Jumlah	14	28	42	

Guna memaksimalkan pelayanan perangkat daerah perlu dukungan SDM yang memadai, dalam hal ini adalah pemenuhan kebutuhan tenaga Pustakawan dan Arsiparis secara kuantitatif dan kualitatif dalam menjalankan tugas dan pembinaan pada OPD. Berikut ini adalah kondisi eksisting SDM Dispusdikar yang dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 5 Kondisi Eksisting SDM Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Per 01 Agustus 2025

No	Jabatan	Kebutuhan	Ada	Kosong	Keterangan
1	Kepala Dinas	1	1		
2	Sekretaris	1	1		
3	Eselon III.b				
	1. Kabid Perpustakaan	1	1		
	2. Kabid Kearsipan	1	1		
4	Eselon IV.a				
	Kasubbag Umum	1	1		
5	Perencana Ahli Muda	1	0	1	
6	Perencana Ahli Pertama	3	1	2	(1 PPPK)
7	Pustakawan	24	6	18	(3 Muda, 1 Penyelia, 2 Mahir)
8	Arsiparis	19	9	10	(1 PPPK terampil, 2 PNS terampil, 3 PNS Mahir, 2 CPNS Pertama, 1 PNS Muda)
9	Pranata Komputer	2	1		
10	Penata Laksana Barang	0		1	
11	Penelaah Teknis Kebijakan	3	2	1	2 PNS
12	Pengolah Data dan Informasi	2	0	2	
13	Penata Layanan Operasional	0	1		(1 PPPK) tdk ada rumahnya
14	Operator Layanan Operasional	20	5	15	(3 PPPK, 2 PNS)
15	Pengadministrasi	9	12		(8 PPPK, 4 PNS)

No	Jabatan	Kebutuhan	Ada	Kosong	Keterangan
	Perkantoran				
	Jumlah		42		

2.2.2.

Sarana dan Prasarana

2.2.2.1 Ruang Pelayan Perpustakaan

Bangunan Dinas Perpustakaan dan Arsip terdiri atas 5 (lima) lantai dalam memberikan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat memiliki fasilitas ruangan diperuntukkan bagi kelompok umur, masyarakat umum, dan khusus. Ruang pelayanan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 6 Ruang Pelayan Perpustakaan

No	Lantai	Nama Ruang	Keterangan
1	I	Ruang Informasi dan Pendaftaran Keanggotaan	
2	I	Ruang Bermain Anak	
3	I	Ruang Laktasi	
4	I	Ruang Diskusi	
5	I	Pojok Braile	
6	I	Mushola	
7	II	Ruang Koleksi Anak	
8	II	Ruang Multimedia dan Internet	
9	II	Migas Corner	
10	II	Pojok Bank Indonesia dan Pojok Lingkungan Hidup	
11	III	Ruang Koleksi Umum	
12	III	Ruang Koleksi Referensi	
13	III	Ruang Koleksi Konten Lokal	
14	IV	Ruang Terbitan Berkala	
15	IV	Aula	
16	Outdoor	Taman dan Gazebo Literasi	

2.2.2.2 Koleksi Buku

Pada tahun 2024 jumlah koleksi buku Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan sebanyak 182.099 eksemplar buku dengan 56.954 judul buku. Rincian klasifikasi buku dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7 Klasifikasi Koleksi Buku

Golongan /Klasifikasi Buku	JUMLAH	
	Judul	Eksemplar
000 - Karya Umum	2548	5920
100 - Filsafat dan Psikologi	1888	4684
200 - Agama	3372	8950
300 - Ilmu Sosial	5018	12118
400 - Bahasa	966	2383
500 - Ilmu Murni	1760	4280
600 - Ilmu Terapan	6954	17928
700 - Kesenian dan Olahraga	3343	6664
800 - Kesusasteraan	2119	4882
900 - Sejarah dan Geografi	1529	3669
Fiksi	9276	27185
Kanak-kanak	3666	10058
Lainnya	1407	2036
Koleksi Digital	13108	71342
<b>Total</b>	56954	182099

**2.2.2.3 Kendaraan Operasional Perpustakaan**

Layanan perpustakaan keliling merupakan salah satu upaya Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan dalam mempromosikan, mempermudah akses, serta meningkatkan minat dan budaya literasi masyarakat. Sebagai salah satu bagian dari sarana kegiatan pembinaan perpustakaan sekolah dan masyarakat, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan memiliki 3 (tiga) unit kendaraan perpustakaan keliling yang difasilitasi koneksi internet, terbitan berkala, dan koleksi buku perpustakaan dijalankan untuk menjangkau sekolah, kelurahan, kecamatan, dan area publik dari pagi hari sampai siang hari digunakan untuk layanan perpustakaan keliling bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs serta masyarakat yang berada di wilayah Kota Balikpapan

**2.2.2.4 Ruang Pelayan Arsip**

Dalam bangunan gedung Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan terdapat ruangan pelayanan arsip yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 8 Ruang Pelayan Arsip

No	Lantai	Nama Ruangan	Keterangan
1	Basement	Ruang Transit Arsip	digunakan untuk menerima arsip yang baru dipindahkan/diserahkan
2	Basement	Ruang Pengolahan	Digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengolahan arsip
3	Basement	Ruang Pemusnahan	digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemusnahan arsip dan non arsip
4	I	Planning Gallery	ruang pameran arsip foto
5	II	Depo Arsip Inaktif	ruangan penyimpanan arsip inaktif
6	III	Ruang Layanan	digunakan untuk menerima tamu/pengunjung
7	III	Depo Arsip Statis	ruangan penyimpanan arsip statis

2.2.2.5 Asset/Modal

Asset/Modal yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan sampai dengan Desember 2025 sesuai tabel di bawah ini:

Tabel 2. 9 Asset/Modal yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

No.	Asset yang tersedia	Jumlah/ Luas	Kondisi			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
	<b>TANAH</b>					
1	Tanah, Jl. Kapt. Piere Tendean No. 1 Balikpapan	2.348 m <sup>2</sup>	2.348 m <sup>2</sup>			
2	Tanah, Jalan Ruhui Rahayu I Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan	1.030 m <sup>2</sup>	1.030 m <sup>2</sup>			
3	Tanah, Jl. Lingkungan Pandan Barat - Kel.Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat	848 m <sup>2</sup>	848 m <sup>2</sup>			
	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>					
1	Alat angkut roda 4 (empat)	8 unit	7	1		
2	Alat Angkut Roda 2 (dua)	5 unit	5			
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.264 unit	1.180	5	25	54

No.	Asset yang tersedia	Jumlah/ Luas	Kondisi			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
4	Lift	1 unit		1		
5	Genset	3 unit	2			1
6	Komputer dan peralatan komputer	223 unit	197	6	5	15
7	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	31 unit	26		4	1
8	Alat Kedokteran dan Kesehatan	4 unit	3	1		
9	Alat Laboratorium	25 unit	20		5	
10	Alat Keamanan lainnya	4 unit	3			1
11	Software	25	25			
	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>					
1	Gedung Kantor (Perpustakaan dan Kearsipan)	2.086 m <sup>2</sup>		2.086 m <sup>2</sup>		
2	Gedung Kantor	136.75 m <sup>2</sup>		136.75 m <sup>2</sup>		
3	Taman	2 titik		2 titik		
	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>					
1	Buku	2.725 Judul	2.725			
	<b>INSTALASI</b>					
1	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Besar		Baik			

**Sumber: Daftar Aset Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, per 31 Desember 2025**

**2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja berdasarkan target Rencana Strategis periode sebelumnya. Secara terperinci evaluasi pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah berdasar Rencana Strategis Perangkat Daerah ditunjukkan pada Tabel T-C.23. yang menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target Rencana Strategis Perangkat Daerah periode sebelumnya.

**Tabel 2.10** Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase peningkatan layanan perpustakaan	-	-	(indikator disesuaikan)	N/A	10	10	10	10	10	10,83	21,43	29,41			108,30%	214,30%	294,10%	
2	Nilai pengawasan kearsipan	-	-	-	N/A	90,10	90,20	90,30	90,40	22,95	32,71	65,04	71,78			36,30 %	72,11%	79,49%	
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				N/A	27,00	28,75	30,50	32,25	N/A	30,41	-	-			112,63%			
4	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan	-	-	-	N/A	70,00	72,00	74,00	76,00	65,96	63,27	67,38	71,50	72,36		90,39 %	93,58%	96,62%	95,21%



**Tabel 2.11** Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021-2025

Uraian ***)	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Operasi	9.316.989.860	9.630.469.902	10.122.276.856	13.213.211.059	14.823.457.503	7.309.811.003	8.922.828.963	9.510.327.149	11.709.840.774	6.460.164.825	78,46%	92,65%	93,95%	88,62%	0,44%	10,24%	1,39%
Belanja Modal	848.770.000	731.318.000	899.875.594	959.970.318	550.127.458	827.448.270	690.764.896	815.851.000	890.510.092	8.325.000	97,49%	94,45%	90,66%	92,76%	0,02%	-5,36%	-17,66%
Jumlah	10.165.759.860	10.361.787.902	11.022.152.450	14.173.181.377	15.373.584.961	8.137.259.273	9.613.593.859	10.326.178.149	12.600.350.866	6.468.489.825	80,05%	92,78%	93,69%	88,90%	0,42%	-12,12%	-18,16%

### 2.4. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi serta berbasis inklusi sosial. Sedangkan Arsip merupakan rekaman kegiatan/peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun permasalahan dan isu strategis yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Arsip adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.12** Permasalahan dan isu strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perpustakaan merupakan wahana mengembangkan keterampilan dan pengetahuan bagi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.	Masih belum optimalnya pengelolaan perpustakaan yang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan sangat berperan pada pencapaian tujuan ke-4 SDGs Pendidikan berkualitas yaitu memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang, dimana Perpustakaan berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan bahan informasi masyarakat melalui layanan yang inklusif.	Demografi global	1.Rendahnya kualitas sumber daya manusia 2.Pergeseran struktur kelas masyarakat	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM	1. Kualitas layanan perpustakaan belum optimal 2.Optimalisasi Budaya Baca dan Literasi
Arsip sebagai warisan budaya dan bahan bukti yang sah	Pengelolaan arsip di Perangkat Daerah Kota Balikpapan belum optimal	Kearsipan berperan pada pencapaian tujuan ke-4 SDGs dalam memastikan bahwa sejarah, pengetahuan dan informasi dapat diakses dan dilestarikan untuk generasi mendatang sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan		Tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan	Tata kelola pemerintahan yang baik	Masih rendahnya budaya tertib arsip di Perangkat Daerah

Upaya pengembangan perpustakaan dan kearsipan sampai saat ini masih dihadapkan kepada tantangan dan kendala antara lain:

a. Perpustakaan .

1. Pertumbuhan berbagai jenis perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan rumah ibadah relatif rendah;
2. Koleksi bahan pustaka berbagai jenis perpustakaan masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat;
3. SDM pengelola perpustakaan terbatas;
4. Belum optimalnya layanan perpustakaan daerah;
5. Layanan perpustakaan keliling belum menjangkau ke seluruh wilayah Kota Balikpapan;
6. Masih banyak perpustakaan binaan yang belum mengelola perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP).
7. Masyarakat dalam mencari informasi lebih memilih memakai Gadget.
8. Belum maksimalnya pemanfaatan perpustakaan digital (iBalikpapan)
9. Sebaran perpustakaan kelurahan belum merata di seluruh wilayah

b. Kearsipan

1. Lembaga Kearsipan belum dipandang sebagai sumber referensi, informasi, dan penelitian;
2. Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;
3. Belum optimalnya pemanfaatan arsip sebagai bagian dari audit;
4. Keterbatasan SDM kearsipan yang memiliki kualifikasi;
5. Sarana dan prasarana pengelolaan dan penyimpanan arsip di instansi pencipta arsip belum terpenuhi sesuai dengan kaidah kearsipan;
6. Rendahnya tingkat kesadaran pencipta arsip dalam mengelola dan menyelamatkan arsip;
7. Rendahnya minat dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya arsip.

## **2.5. Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota**

### **2.5.1. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga**

#### **2.5.1.1 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia**

Visi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2025 - 2029 yaitu: **“Perpustakaan Hadir Demi Martabat Bangsa”**. Visi ini menegaskan peran perpustakaan sebagai pusat pengetahuan yang berfokus pada peningkatan kreativitas, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Misi Perpusnas RI (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia) memiliki hubungan erat dengan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029. Misi Perpusnas, yang berfokus pada penguatan budaya baca, literasi, dan pelestarian warisan budaya, dijabarkan dalam program-program yang selaras dengan target dan prioritas RPJMN. Perpusnas menyesuaikan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 agar sejalan dengan RPJMN, memastikan indikator seperti Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dapat tercapai.

Dalam dokumen Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2025-2029 telah ditetapkan tujuan Perpusnas yaitu meningkatkan budaya baca dan kecakapan literasi masyarakat melalui berbagai program, seperti

Gerakan Indonesia Membaca dan TPBIS (Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial), dengan fokus pada pelayanan prima, peningkatan sumber daya manusia, pemanfaatan warisan budaya, dan penguatan kemitraan untuk mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat dengan sasaran strategis yaitu:

- 1. Penguatan budaya membaca dan peningkatan kecakapan literasi.
- 2. Pengarusutamaan naskah Nusantara.
- 3. Standardisasi serta akreditasi perpustakaan”.

Ketiga sasaran ini didukung oleh beberapa faktor, termasuk infrastruktur memadai, kepemimpinan transformasional, program yang memberdayakan, dan kemitraan yang saling menguntungkan”, dengan indikator:

- Nilai kegemaran membaca dari 72,44 (Baseline 2024)
- Indeks pembangunan literasi masyarakat dari 73,52 (Baseline 2024)

2.5.1.2 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Dalam urusan Bidang Kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan berpedoman kepada Arah Penyelenggaraan Kearsipan Nasional 2025 - 2029, yang di dalamnya terdapat Tujuan ANRI yaitu **“Terwujudnya Kearsipan yang Transformatif untuk Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa dan Tata Kelola Pemerintahan”**.

Adapun sasaran strategis ANRI adalah sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya Budaya Tertib Arsip Secara Nasional.
- 2. Terwujudnya Memori Kolektif Bangsa Indonesia yang Autentik, Utuh, dan Terpercaya.
- 3. Terwujudnya Kinerja ANRI yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional.

**Tabel 2.13** Permasalahan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<b>Perpustakaan Nasional RI</b>			
1	Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Koleksi bahan pustaka berbagai jenis perpustakaan masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.	Keterbatasan anggaran	Adanya potensi pembiayaan yang bersumber dari CSR
		SDM pengelola perpustakaan terbatas.	Masih rendahnya minat ASN untuk masuk ke dalam jabatan fungsional Pustakawan	Dilaksanakannya diklat-diklat Pustakawan dan tenaga pengelola Perpustakaan, serta adanya penetapan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				kebutuhan fungsional pustakawan sampai tingkat perpustakaan sekolah negeri pada jenjang pendidikan dasar.
		Belum maksimalnya pemanfaatan Perpustakaan digital (iBalikpapan)	Kurangnya sosialisasi	Pemanfaatan media social untuk mempromosikan iBalikpapan kepada masyarakat
	Arsip Nasional RI			
1	Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	Tingkat kepatuhan para penyelenggara kearsipan	Masih rendahnya tingkat kepatuhan para penyelenggara kearsipan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan kearsipan	Pelaksanaan pengawasan Kearsipan di Pemerintah Daerah
2	Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional	Tingkat ketersediaan arsip	Peran arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa kurang optimal	Preservasi arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya
3	Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima	Tingkat kualitas pelayanan informasi kearsipan	Kualitas pelayanan kearsipan kepada publik masih rendah	Telah dibangunnya Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)

2.5.2.

T

elaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yaitu **“Berdaulat mewujudkan budaya baca dan sadar tertib arsip di Kalimantan Timur”**. Adapun misinya adalah **“Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Dan Sadar Tertib Arsip Di Kalimantan Timur”**.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu:

- A. Meningkatkan sumber daya perpustakaan di Kalimantan Timur, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas SDM, kuantitas sarana prasarana perpustakaan, serta kapasitas kelembagaan secara terpadu
- B. Meningkatkan pengembangan, pendayagunaan dan pelestarian bahan perpustakaan dengan sasaran terukur meliputi:
  - 1. Jumlah Pengembangan Koleksi Bahan Perpustakaan (alih media)
  - 2. Jumlah Bahan Perpustakaan Yang dilestarikan
- C. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat di Kalimantan Timur, dengan sasaran terukur meliputi:
  - 1. Jumlah Masyarakat yang Mendayagunakan Perpustakaan
  - 2. Skor Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perpustakaan
  - 3. Produk Perjanjian Kerjasama Perpustakaan yg dihasilkan
- D. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kualitas tenaga perpustakaan dengan sasaran terukur meliputi:
  - 1. Jumlah perpustakaan yang dibina dan dikembangkan
  - 2. Jumlah tenaga fungsional dan tenaga perpustakaan yg dibina dan dikembangkan
  - 3. Jumlah kegiatan pembudayaan gemar membaca
- E. Meningkatkan SDM pengelola kearsipan dan sistem administrasi kearsipan yang berkualitas di Kalimantan Timur, dengan sasaran terukur meliputi: Jumlah OPD/Institusi yang dilakukan pengawasan.
- F. Meningkatkan upaya penyelamatan, pelestarian dan pendayagunaan arsip yang bernilai guna, dengan sasaran terukur meliputi: Jumlah akuisisi dan pengolahan arsip

**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Balikpapan**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah selama lima tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam lima tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1** Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel - SDM yang cerdas dan sehat	Meningkatnya literasi masyarakat dan Budaya Tertib Arsip		Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	73.48	73.98	74.48	74.98	75.48	75.98	
			Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah (Nilai)	72	73	74	75	76	78	
		Meningkatnya Literasi Masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (%)	81.06	81.08	81.1	81.12	81.14	81.16	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kearsipan	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai pengawasan kearsipan dengan kategori minimal baik (%)	36	42	50	58	69	83	
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	72.36	73.45	74.55	75.67	76.80	77.95	

**3.2. Strategi Renstra Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Balikpapan**

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan

dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan.

**Tabel 3.2** Strategi Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan SDM pengelola perpustakaan, infrastruktur layanan dan koleksi perpustakaan	Penguatan SDM pengelola perpustakaan, infrastruktur layanan dan koleksi perpustakaan	Akselerasi layanan perpustakaan, penguatan budaya baca dan literasi	Perwujudan layanan perpustakaan yang optimal dan budaya baca & literasi masyarakat	Kesinambungan layanan perpustakaan yang optimal dan budaya baca & literasi masyarakat
Peningkatan Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis, Akuisisi Arsip dan Digitalisasi Arsip	Penguatan Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis, Akuisisi Arsip dan Digitalisasi Arsip	Akselerasi Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis, Akuisisi Arsip dan Digitalisasi Arsip	Perwujudan Pengelolaan Arsip Dinamis & Arsip Statis yang optimal	Kesinambungan Pengelolaan Arsip Dinamis & Arsip Statis yang optimal

Strategi pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan dalam periode perencanaan lima tahun dirumuskan secara bertahap untuk memastikan peningkatan kualitas layanan yang berkelanjutan. Setiap strategi disusun berdasarkan kebutuhan, kapasitas, serta arah prioritas pada masing-masing tahun, sehingga mampu menghasilkan perubahan yang terukur dan berdampak bagi masyarakat.

**3.3. Arah Kebijakan Renstra Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Balikpapan**

Arah kebijakan Renstra adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Adapun arah kebijakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3** Arah kebijakan Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengorganisasian	Penguatan	Peningkatan	



NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Perpustakaan, Sumber Daya Manusia, koleksi, Sarana dan Prasarana, pelayanan, penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan	layanan perpustakaan di wilayah Kota Balikpapan	pembinaan perpustakaan	
			Peningkatan Kompetensi SDM pengelola perpustakaan	
2	Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan	Perbaikan tata kelola kelembagaan dan birokrasi	Peningkatan budaya tertib arsip	
			Peningkatan kapasitas SDM kearsipan	
			Penyelamatan arsip dalam rangka ketersediaan arsip yang autentik pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan	

Arah kebijakan pada sektor perpustakaan mengacu pada operasionalisasi NSPK mengenai pengorganisasian layanan perpustakaan, sumber daya manusia, koleksi, sarana prasarana, pelayanan, penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan. Sejalan dengan arah kebijakan RPJMD yang mendorong penguatan layanan perpustakaan di wilayah Kota Balikpapan, maka arah kebijakan perangkat daerah difokuskan pada tiga area strategis berikut:

- 1. Peningkatan pembinaan perpustakaan**  
 Arah kebijakan ini mencakup penguatan fungsi pembinaan terhadap perpustakaan sekolah, perpustakaan kelurahan, dan jenis perpustakaan lainnya agar mampu memenuhi standar layanan minimal. Pembinaan dilakukan melalui fasilitasi, supervisi, monitoring, dan pendampingan teknis secara berkala.
- 2. Peningkatan kompetensi SDM pengelola perpustakaan**  
 Dalam rangka menjamin mutu layanan, peningkatan kapasitas dan profesionalitas pustakawan maupun tenaga perpustakaan menjadi prioritas. Hal ini dilakukan melalui pelatihan teknis, sertifikasi kompetensi, pendampingan, dan peluang peningkatan kualifikasi.
- 3. Penguatan layanan perpustakaan bagi masyarakat**  
 Arah kebijakan ini diarahkan untuk memperluas akses layanan, meningkatkan kualitas koleksi, memodernisasi sarana prasarana, serta mengembangkan layanan berbasis teknologi digital. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat Kota Balikpapan.

Arah kebijakan pada sektor kearsipan mengacu pada NSPK terkait pedoman penyelenggaraan kearsipan. Sejalan dengan arah kebijakan RPJMD mengenai perbaikan tata kelola kelembagaan dan birokrasi, arah kebijakan perangkat daerah diarahkan pada penguatan sistem kearsipan yang tertib, akuntabel, dan modern. Fokus arah kebijakan meliputi:

- 1. **Peningkatan budaya tertib arsip**  
Melalui kebijakan ini, perangkat daerah diharapkan menerapkan penyelenggaraan arsip yang sesuai aturan, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip. Upaya dilakukan dengan membentuk kesadaran dan kedisiplinan aparatur terhadap pentingnya arsip sebagai memori organisasi.
- 2. **Peningkatan kapasitas SDM kearsipan**  
Arah kebijakan ini bertujuan memastikan aparatur memiliki kompetensi yang memadai dalam pengelolaan arsip dinamis maupun statis. Penguatan dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi arsiparis, serta peningkatan pemahaman mengenai regulasi kearsipan.
- 3. **Penyelamatan arsip untuk menjamin ketersediaan arsip autentik**  
Kebijakan ini menekankan pentingnya penyelamatan arsip-arsip bernilai guna tinggi agar dapat menjadi bukti sah pertanggungjawaban pemerintah dan sumber sejarah yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Termasuk di dalamnya kegiatan akuisisi arsip statis, penyimpanan sesuai standar, serta digitalisasi arsip untuk memperkuat aksesibilitas dan pelestarian arsip jangka panjang.

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode tahun 2025–2029 sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang perpustakaan dan kearsipan. Penyusunan Renstra ini mengacu pada tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, sekaligus selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut, Dinas Perpustakaan dan Arsip telah merumuskan arah kebijakan, strategi, serta rencana program dan kegiatan yang dituangkan secara rinci melalui matrik program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, dan kerangka pendanaan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.10 dan Tabel 2.11. Matrik tersebut menjadi instrumen penting yang menggambarkan keterkaitan antara sasaran pembangunan daerah dengan langkah operasional yang akan dilaksanakan selama periode perencanaan.

Secara keseluruhan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan menetapkan **4 program, 12 kegiatan, dan 32 sub kegiatan** yang akan menjadi fokus pelaksanaan dalam lima tahun ke depan. Program-program tersebut mencerminkan upaya peningkatan kualitas layanan perpustakaan, penguatan budaya literasi, penataan dan penguatan sistem kearsipan, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan. Setiap program dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur dan jelas.

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan juga mencakup pengelolaan urusan perpustakaan dan kearsipan. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Renstra ini menyajikan kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan, sekaligus memastikan bahwa seluruh program dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Dengan tersusunnya rencana program dan kegiatan untuk periode 2025–2029, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, memperkuat budaya baca dan literasi masyarakat, serta mewujudkan tata kelola arsip yang tertib, modern, dan akuntabel. Renstra ini menjadi landasan strategis dalam membangun penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan yang profesional, inovatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Balikpapan.

**Tabel 4.1** Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Balikpapan

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SDM yang Cerdas dan Sehat	Meningkatnya Literasi Masyarakat dan tata kelola kearsipan				<b>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat</b>		
					<b>Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah (Nilai)</b>		
		<b>Meningkatnya Literasi Masyarakat</b>			<b>Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (%)</b>		
			<b>Meningkatnya Layanan Perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan</b>		<b>Persentase Perpustakaan yang terakreditasi SNP</b>	<b>Pembinaan Perpustakaan</b>	
				<b>Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah</b>		<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
					Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	<b>Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan</b>	
					Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	<b>Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota</b>	
					Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota	<b>Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		
					Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	<b>Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan</b>	
					Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan</b>	
					Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	<b>Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik</b>	
				<b>Terlaksananya pembudayaan gemar membaca tingkat daerah</b>		<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
					Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	<b>Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial</b>	
					Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	<b>Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat</b>	
		<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kearsipan</b>			<b>Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai pengawasan kearsipan dengan kategori minimal baik</b>		
			<b>Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis</b>		<b>Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip dinamis dan statis sesuai dengan NSPK</b>	<b>Pengelolaan Arsip</b>	
				<b>Terlaksananya pengelolaan arsip dinamis daerah</b>		<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	
					Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah	Pembinaan kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis		
				<b>Terlaksananya pengelolaan arsip statis daerah</b>		<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	
					Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	
			<b>Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK</b>		<b>Persentase arsip hasil alih media yang telah diautentikasi</b>	<b>Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</b>	
				<b>Terlaksananya Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</b>		<b>Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</b>	
					Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	
				<b>Terlaksananya Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media</b>		<b>Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota</b>	
					Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	
		<b>Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas</b>			<b>Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)</b>		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
		Kinerja Pemerintah					
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis	
				Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang disediakan	Sub kegiatan pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Pemerintah Daerah			
					Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah mebel yang dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2 Rencana dan Pendanaan Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Balikpapan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				13.413.845.200		13.546.211.000		16.236.777.000		16.541.701.000		17.027.106.000	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.146.510.965		12.278.876.765		14.098.452.000		14.296.448.000		14.669.585.300	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	95,45	95,46	12.146.510.965	95,47	12.278.876.765	95,48	14.098.452.000	95,49	14.296.448.000	95,5	14.669.585.300	
2.23.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.423.273.000		7.555.638.800		7.757.554.565		7.657.255.692		7.717.183.376	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Laporan realisasi anggaran perangkat daerah secara berkala dan akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27	51	7.423.273.000	51	7.555.638.800	51	7.757.554.565	51	7.657.255.692	51	7.717.183.376	
2.23.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.423.273.000		7.555.638.800		7.757.554.565		7.657.255.692		7.717.183.376	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27	51	7.423.273.000	51	7.555.638.800	51	7.757.554.565	51	7.657.255.692	51	7.717.183.376	
2.23.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				405.960.000		405.960.000		700.000.000		735.000.000		771.750.000	
Data dan dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tertib dan akuntabel	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	68	51	405.960.000	51	405.960.000	80	700.000.000	81	735.000.000	82	771.750.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	51		79		79		79		79		
2.23.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				24.960.000		24.960.000		70.000.000		73.500.000		77.175.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	68	51	24.960.000	51	24.960.000	80	70.000.000	81	73.500.000	82	77.175.000	
2.23.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				381.000.000		381.000.000		630.000.000		661.500.000		694.575.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	51	381.000.000	79	381.000.000	79	630.000.000	79	661.500.000	79	694.575.000	
2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				758.719.700		758.719.700		1.306.253.347		1.352.816.015		1.401.706.815	
Laporan pelaksanaan administrasi umum dan pengelolaan sarana perkantoran secara efektif dan efisien	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	747	770	758.719.700	771	758.719.700	772	1.306.253.347	773	1.352.816.015	774	1.401.706.815	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	756	3.100		3,2		3,3		3,4		3,5		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	18	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	38	40		40		40		40		40		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	16.155	16.384		16.484		16.584		16.684		16.784		
	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	18.913	14.500		14,4		14,3		14,2		14,1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	16		17		18		19		20		
2.23.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi  Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				37.731.015		37.731.015		51.353.347		53.921.015		56.617.065	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	747	770	37.731.015	771	37.731.015	772	51.353.347	773	53.921.015	774	56.617.065	
2.23.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.131.500		2.131.500		492.450.000		517.072.500		542.926.125	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	16	2.131.500	17	2.131.500	18	492.450.000	19	517.072.500	20	542.926.125	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.23.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				328.857.979		328.857.979		330.750.000		347.287.500		364.651.875	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	16.155	16.384	328.857.979	16.484	328.857.979	16.584	330.750.000	16.684	347.287.500	16.784	364.651.875	
2.23.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				40.000.490		40.000.490		44.000.000		43.000.000		42.000.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	18.913	14.500	40.000.490	14,4	40.000.490	14,3	44.000.000	14,2	43.000.000	14,1	42.000.000	
2.23.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				18.075.000		18.075.000		31.000.000		32.000.000		33.000.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang	756	3.100	18.075.000	3,2	18.075.000	3,3	31.000.000	3,4	32.000.000	3,5	33.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Disediakan (Dokumen)												
2.23.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				31.923.716		31.923.716		56.700.000		59.535.000		62.511.750	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	18	12	31.923.716	12	31.923.716	12	56.700.000	12	59.535.000	12	62.511.750	
2.23.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	38	40	300.000.000	40	300.000.000	40	300.000.000	40	300.000.000	40	300.000.000	
2.23.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				296.543.000		296.543.000		680.625.750		714.657.038		750.389.890	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2	2	296.543.000	2	296.543.000	4	680.625.750	4	714.657.038	4	750.389.890	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	27	0		20		21		22		23		
2.23.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				296.543.000		296.543.000		628.125.750		659.532.038		692.508.640	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2	2	296.543.000	2	296.543.000	4	628.125.750	4	659.532.038	4	692.508.640	
2.23.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		0		52.500.000		55.125.000		57.881.250	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	27	0	0	20	0	21	52.500.000	22	55.125.000	23	57.881.250	
2.23.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.502.604.965		2.502.604.965		2.604.000.000		2.734.200.000		2.870.910.000	
Laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.502.604.965	12	2.502.604.965	12	2.604.000.000	12	2.734.200.000	12	2.870.910.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.23.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				675.960.800		675.960.800		840.000.000		882.000.000		926.100.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	675.960.800	12	675.960.800	12	840.000.000	12	882.000.000	12	926.100.000	
2.23.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.826.644.165		1.826.644.165		1.764.000.000		1.852.200.000		1.944.810.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	1.826.644.165	12	1.826.644.165	12	1.764.000.000	12	1.852.200.000	12	1.944.810.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	(Laporan)												
2.23.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				759.410.300		759.410.300		1.050.018.338		1.102.519.255		1.157.645.219	
Barang milik daerah dalam kondisi baik dan fungsional melalui kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	759.410.300	40	759.410.300	41	1.050.018.338	42	1.102.519.255	43	1.157.645.219	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	6		6		6		6		6		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	132	120		121		122		123		136		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	6		6		6		6		6		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.23.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				126.521.850		126.521.850		152.966.100		160.614.405		168.645.125	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	6	126.521.850	6	126.521.850	6	152.966.100	6	160.614.405	6	168.645.125	
2.23.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				218.994.500		218.994.500		256.315.043		269.130.795		282.587.335	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	6	218.994.500	6	218.994.500	6	256.315.043	6	269.130.795	6	282.587.335	
2.23.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		0		168.000.000		176.400.000		185.220.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	40	0	41	168.000.000	42	176.400.000	43	185.220.000	
2.23.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				307.897.950		307.897.950		238.215.600		250.126.380		262.632.699	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	132	120	307.897.950	121	307.897.950	122	238.215.600	123	250.126.380	136	262.632.699	
2.23.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				105.996.000		105.996.000		234.521.595		246.247.675		258.560.060	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	1	1	105.996.000	1	105.996.000	1	234.521.595	1	246.247.675	1	258.560.060	
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				1.267.334.235		1.267.334.235		2.138.325.000		2.245.253.000		2.357.520.700	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Meningkatnya Layanan Perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional (%)	7	8	1.267.334.235	8	1.267.334.235	8,5	2.138.325.000	9	2.245.253.000	9,5	2.357.520.700	
2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.134.146.965		1.134.146.965		1.752.450.000		1.840.083.000		1.932.086.700	
Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan )	21	21	1.134.146.965	21	1.134.146.965	22	1.752.450.000	23	1.840.083.000	24	1.932.086.700	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan)	2	17		17		18		19		20		
	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan )	2	7		7		7		8		8		
	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	1	7		7		7		7		7		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	182.099	188.599		189.599		191.099		192.799		194.599		
	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan )	9	7		9		10		10		10		
2.23.02.2.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah				67.464.730		67.464.730		143.325.000		150.492.000		158.016.700	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan													
Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan )	21	21	67.464.730	21	67.464.730	22	143.325.000	23	150.492.000	24	158.016.700	
2.23.02.2.01.0012 - Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota				673.668.265		673.668.265		855.540.000		898.317.000		943.233.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan)	2	17	673.668.265	17	673.668.265	18	855.540.000	19	898.317.000	20	943.233.000	
2.23.02.2.01.0013 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota				114.890.000		114.890.000		315.000.000		330.750.000		347.287.500	
Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	9	7	114.890.000	9	114.890.000	10	315.000.000	10	330.750.000	10	347.287.500	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	(Perpustakaan )												
2.23.02.2.01.0017 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan				22.910.000		22.910.000		149.730.000		157.217.000		165.077.500	
Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	1	7	22.910.000	7	22.910.000	7	149.730.000	7	157.217.000	7	165.077.500	
2.23.02.2.01.0018 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan				243.214.270		243.214.270		275.625.000		289.407.000		303.877.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	182.099	188.599	243.214.270	189.599	243.214.270	191.099	275.625.000	192.799	289.407.000	194.599	303.877.000	
2.23.02.2.01.0020 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik				11.999.700		11.999.700		13.230.000		13.900.000		14.595.000	
Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangka n dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan )	2	7	11.999.700	7	11.999.700	7	13.230.000	8	13.900.000	8	14.595.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				133.187.270		133.187.270		385.875.000		405.170.000		425.434.000	
Terlaksananya pembudayaan gemar membaca tingkat daerah	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Ko ta yang dikembangkan (Perpustakaan )	5	6	133.187.270	6	133.187.270	7	385.875.000	7	405.170.000	7	425.434.000	
	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	6	6		6		6		6		6		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.23.02.2.02.0007 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				9.130.000		9.130.000		237.037.500		248.890.000		261.340.000	
Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Ko ta yang dikembangkan (Perpustakaan )	5	6	9.130.000	6	9.130.000	7	237.037.500	7	248.890.000	7	261.340.000	
2.23.02.2.02.0010 - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				124.057.270		124.057.270		148.837.500		156.280.000		164.094.000	
Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	6	6	124.057.270	6	124.057.270	6	148.837.500	6	156.280.000	6	164.094.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Dasar dan Masyarakat (Lokus)												
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				624.024.395		912.795.000		945.179.000		983.894.000		1.024.257.000	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				547.536.610		841.758.000		871.621.000		907.323.000		944.545.000	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip dinamis dan statis sesuai dengan NSPK (Persentase)	100	100	547.536.610	100	841.758.000	100	871.621.000	100	907.323.000	100	944.545.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				352.537.890		546.758.000		571.621.000		592.323.000		614.545.000	
Terlaksananya pengelolaan arsip dinamis daerah	Jumlah OPD kabupaten/ko ta dan BUMD kabupaten/ko ta yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)	36	36	352.537.890	36	546.758.000	36	571.621.000	36	592.323.000	36	614.545.000	
	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPO L kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimpleme ntasi pengelolaan arsip dinamis (Instansi)	36	36		36		36		36		36		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.24.02.2.01.0005 - Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				226.948.450		300.000.000		321.621.000		337.323.000		354.545.000	
Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota	Jumlah OPD kabupaten/ko ta dan BUMD kabupaten/ko ta yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)	36	36	226.948.450	36	300.000.000	36	321.621.000	36	337.323.000	36	354.545.000	
2.24.02.2.01.0010 - Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota				125.589.440		246.758.000		250.000.000		255.000.000		260.000.000	
Terlaksananya Implementasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada ORMAS, ORPOL, OPD/SKPD, BUMD	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPO L kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimpleme	36	36	125.589.440	36	246.758.000	36	250.000.000	36	255.000.000	36	260.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	ntasi pengelolaan arsip dinamis (Instansi)												
2.24.02.2.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				194.998.720		295.000.000		300.000.000		315.000.000		330.000.000	
Terlaksananya pengelolaan arsip statis daerah	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	1.699	750	194.998.720	850	295.000.000	950	300.000.000	1.050	315.000.000	1.200	330.000.000	
2.24.02.2.02.0004 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis				194.998.720		295.000.000		300.000.000		315.000.000		330.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	1.699	750	194.998.720	850	295.000.000	950	300.000.000	1.050	315.000.000	1.200	330.000.000	
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				76.487.785		71.037.000		73.558.000		76.571.000		79.712.000	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase arsip hasil alih media yang telah autentifikasi (Persentase)	100	100	76.487.785	100	71.037.000	100	73.558.000	100	76.571.000	100	79.712.000	
2.24.03.2.01 - Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				35.687.785		41.037.000		42.558.000		44.571.000		46.712.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	4.015	4.020	35.687.785	4.025	41.037.000	4.030	42.558.000	4.040	44.571.000	4.050	46.712.000	
2.24.03.2.01.0004 - Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				35.687.785		41.037.000		42.558.000		44.571.000		46.712.000	
Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki	4.015	4.020	35.687.785	4.025	41.037.000	4.030	42.558.000	4.040	44.571.000	4.050	46.712.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)												
2.24.03.2.04 - Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota				40.800.000		30.000.000		31.000.000		32.000.000		33.000.000	
Terlaksananya Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	2.000	2.020	40.800.000	2.030	30.000.000	2.040	31.000.000	2.050	32.000.000	2.060	33.000.000	
2.24.03.2.04.0002 - Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				40.800.000		30.000.000		31.000.000		32.000.000		33.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	2.000	2.020	40.800.000	2.030	30.000.000	2.040	31.000.000	2.050	32.000.000	2.060	33.000.000	

**4.2. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan menyelaraskan arah pembangunan sektor perpustakaan dan kearsipan dengan fokus pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Upaya ini dilakukan melalui penetapan sejumlah sub kegiatan prioritas yang memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan publik, penguatan literasi masyarakat, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Sub kegiatan prioritas yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut merupakan bagian dari program dan kegiatan utama yang telah dirancang untuk memastikan tercapainya target pembangunan secara efektif dan terukur. Sub kegiatan tersebut mencakup layanan perpustakaan yang berorientasi pada peningkatan budaya baca dan akses informasi masyarakat, serta sub kegiatan kearsipan yang diarahkan pada penataan arsip, peningkatan tertib arsip, digitalisasi arsip, dan pemeliharaan arsip autentik sebagai bukti pertanggungjawaban pemerintah.

Penetapan sub kegiatan prioritas ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Renstra 2025–2029 berlangsung secara terarah, terintegrasi, dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dengan adanya sub kegiatan prioritas tersebut, Dinas Perpustakaan dan Arsip diharapkan mampu memperkuat daya dukung sektor perpustakaan dan kearsipan dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, serta masyarakat yang literat dan berwawasan

**Tabel 4.3** Daftar Sub Kegiatan Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETER ANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Layanan Perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.23.02.2.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	

			<b>2.23.02.2.01.0012 - Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota</b>	
			<b>2.23.02.2.01.0013 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota</b>	
			<b>2.23.02.2.01.0017 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan</b>	
			<b>2.23.02.2.01.0018 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan</b>	
			<b>2.23.02.2.01.0020 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik</b>	
			<b>2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			<b>2.23.02.2.02.0007 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial</b>	
			<b>2.23.02.2.02.0010 - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat</b>	
<b>2.</b>	<b>2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis</b>	<b>2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			<b>2.24.02.2.01.0005 - Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota</b>	
			<b>2.24.02.2.01.0010 - Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota</b>	
			<b>2.24.02.2.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			<b>2.24.02.2.02.0004 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis</b>	
<b>3.</b>	<b>2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN</b>	<b>Meningkatnya perlindungan dan</b>	<b>2.24.03.2.01 - Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah</b>	

	DAN PENYELAMATAN ARSIP	penyelamatan arsip sesuai NSPK	Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	
			2.24.03.2.01.0004 - Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	
			2.24.03.2.04 - Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	
			2.24.03.2.04.0002 - Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	

**4.3. Penentuan Target Penyelenggaraan Urusan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan, penentuan target yang tepat dan terukur menjadi sangat penting. Target-target ini tidak hanya membantu dalam mengarahkan upaya dan sumber daya, tetapi juga dalam mengevaluasi keberhasilan dan kemajuan yang telah dicapai. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan target-target ini adalah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi atau lembaga dalam mencapai tujuannya. IKU biasanya ditetapkan berdasarkan visi dan misi organisasi, serta prioritas yang ingin dicapai. Dalam konteks pemerintahan, IKU dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan pertumbuhan ekonomi, atau peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang lebih spesifik dan terukur yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu program atau kegiatan. IKK biasanya ditetapkan berdasarkan IKU dan digunakan untuk memantau kemajuan dan keberhasilan program atau kegiatan. Dalam konteks pemerintahan, IKK dapat digunakan untuk mengukur kinerja program-program pemerintah, seperti program peningkatan kualitas pendidikan atau program peningkatan kualitas kesehatan.

Penentuan target melalui IKU dan IKK dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut:

1. Identifikasi Tujuan: Identifikasi tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi atau lembaga.

- 2. Penetapan IKU: Tetapkan IKU yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai.
- 3. Penetapan IKK: Tetapkan IKK yang spesifik dan terukur untuk mengukur kinerja program atau kegiatan.
- 4. Penentuan Target: Tentukan target yang ingin dicapai berdasarkan IKU dan IKK.
- 5. Pemantauan dan Evaluasi: Pantau dan evaluasi kemajuan yang telah dicapai secara teratur.

Dengan menggunakan IKU dan IKK, organisasi atau lembaga dapat menentukan target yang tepat dan terukur, serta memantau dan mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai. Hal ini dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

**Tabel 4.4** Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	72,98	73,48	73,98	74,48	74,98	75,48	75,98	
2.	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	71,78	72	73	74	75	76	78	
3.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	81,04	81,06	81,08	81,1	81,12	81,14	81,16	
4.	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai pengawasan kearsipan dengan kategori minimal baik	%	30	36	42	50	58	69	83	
5.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,5	72,36	73,45	74,55	75,67	76,8	77,95	



NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7.	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	positif	Nilai	71,78	72	73	74	75	76	78	
8.	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai pengawasan kearsipan dengan kategori minimal baik	positif	%	30	36	42	50	58	69	83	
9.	Persentase arsip hasil alih media yang telah autentifikasi		Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
10.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip dinamis dan statis sesuai dengan NSPK		Persentase	100	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	positif	%	67	67,1	67,2	67,3	67,4	67,5	67,6	
12.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	positif	%	80,25	85	90	92	95	97	100	

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025–2029. Renstra ini disusun sebagai penjabaran lebih lanjut terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Wali Kota Balikpapan Periode 2025–2029.

Sebagai dokumen yang memberikan arah penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan, kearsipan, dan kesekretariatan, Renstra ini diharapkan menjadi pedoman operasional bagi seluruh jajaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan. Pelaksanaannya memerlukan kerja keras, profesionalisme, komitmen, integritas, serta dedikasi yang tinggi dari seluruh aparatur, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip sinergi, harmonisasi, dan kolaborasi guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai target kinerja yang telah ditetapkan untuk periode lima tahun ke depan.

Kami menyadari bahwa dokumen Renstra ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, saran, masukan, dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam penyusunan dokumen perencanaan pada periode-periode selanjutnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, dan kerja sama dalam proses penyusunan Renstra ini. Besar harapan kami agar dokumen ini tidak hanya menjadi instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, tetapi juga dapat memberikan manfaat sebagai sumber informasi dan referensi bagi perangkat daerah lainnya serta masyarakat Kota Balikpapan secara umum.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 merupakan amanat normatif sekaligus instrumen operasional yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan visi pembangunan Kota Balikpapan lima tahun ke depan. Sebagai perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian, dan perikanan, penyusunan Renstra ini menjadi pijakan utama dalam menjabarkan arah pembangunan daerah ke dalam rencana sektoral yang terukur, terpadu, dan berkelanjutan.

Kondisi aktual pembangunan sektor pangan, pertanian dan perikanan di Kota Balikpapan saat ini menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural maupun dinamis. Tantangan tersebut meliputi terbatasnya lahan produktif akibat tekanan urbanisasi dan alih fungsi lahan, ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah, fluktuasi harga hasil pertanian dan perikanan, serta belum optimalnya nilai tambah komoditas lokal yang berdampak pada pendapatan pelaku usaha tani dan nelayan. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia, baik dari sisi pelaku utama maupun aparatur teknis, masih perlu ditingkatkan guna menjawab tantangan modernisasi dan digitalisasi sektor pertanian dan perikanan.

Keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) di wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Balikpapan juga membawa tantangan sekaligus peluang strategis. Kota Balikpapan dituntut untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai salah satu penyangga utama kebutuhan pangan kawasan, sekaligus memperkuat daya saing sektor pertanian dan perikanan dalam menghadapi tekanan permintaan dan kompetisi pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, Renstra ini disusun untuk memastikan kesiapan kebijakan dan program pembangunan sektor pangan, pertanian dan perikanan dalam menjawab tuntutan masa depan yang lebih kompleks dan dinamis.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra menjadi dasar penyusunan Renja tahunan serta alat pengukuran dan evaluasi kinerja OPD.

Renstra memiliki dasar hukum kuat dan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, PP 18 Tahun 2016, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Renstra memiliki nilai strategis karena:

- Menjadi panduan teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
- Menghubungkan kebijakan makro (RPJMD) dengan program sektoral yang lebih teknis;
- Menjadi instrumen integrasi sektoral dan spasial dalam perencanaan pembangunan daerah;
- Menjadi wujud akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pembangunan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan proses sistematis yang dilaksanakan setiap awal periode rencana pembangunan jangka menengah daerah, dengan tujuan untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah secara terukur dan terencana. Sesuai dengan ketentuan

dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi beberapa langkah utama sebagai berikut:

**1. Persiapan Penyusunan Renstra.**

Pada tahap awal, dilakukan pembentukan tim penyusun, penelaahan terhadap dokumen perencanaan yang lebih tinggi (RPJMD), dan penyusunan rencana kerja tim berdasarkan jadwal yang ditetapkan.

**2. Pengumpulan dan Analisis Data.**

Tim menyusun gambaran umum kondisi daerah, potensi dan permasalahan sektor terkait, serta melakukan evaluasi capaian kinerja Renstra periode sebelumnya. Analisis ini mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal perangkat daerah.

**3. Perumusan Isu Strategis**

Berdasarkan hasil analisis data dan evaluasi kinerja, ditetapkan isu-isu strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah di bidang urusan yang menjadi kewenangan perangkat daerah.

**4. Perumusan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan.**

Ditentukan arah kebijakan, strategi, serta kebijakan operasional untuk menjawab isu strategis yang telah dirumuskan, yang kemudian menjadi dasar penentuan tujuan dan sasaran Renstra.

**5. Penyusunan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

Tujuan dan sasaran disusun secara SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound), lengkap dengan indikator kinerja, target lima tahunan, dan proyeksi anggaran indikatif program dan kegiatan.

**6. Penyelarsan dan Konsultasi**

Dokumen rancangan Renstra diselaraskan dengan RPJMD dan Renstra perangkat daerah lain melalui forum perangkat daerah dan konsultasi dengan Bappeda untuk menjamin keterpaduan perencanaan.

**7. Penyempurnaan dan Penetapan Renstra**

Setelah melalui proses konsultasi dan masukan dari pemangku kepentingan, dokumen Renstra disempurnakan, kemudian ditetapkan dengan Peraturan Kepala Perangkat Daerah.

Berikut alur tahapan penyusunan Renstra sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

**Tahapan Penyusunan Renstra  
Perangkat Daerah**



Gambar 1. Bagan Alur tahapan penyusunan Renstra

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dilaksanakan dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Dokumen Renstra memiliki posisi strategis sebagai penjabaran operasional dari visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah selama lima tahun, serta berfungsi sebagai pedoman arah kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Dalam pelaksanaannya, Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya, yaitu:

1. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan**  
Renstra disusun dengan merujuk langsung pada dokumen RPJMD sebagai acuan utama substansi perencanaan lima tahunan, terutama dalam hal visi, misi, tujuan pembangunan daerah, dan indikator kinerja utama (IKU).
2. **Renstra Kementerian / Lembaga Terkait**  
Dokumen Renstra juga mengacu pada Renstra Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional guna menjamin konsistensi dan sinergi antara kebijakan daerah dengan prioritas pembangunan nasional.
3. **Renstra Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur**  
Dalam rangka menyelaraskan arah pembangunan lintas wilayah dan mendukung pelaksanaan program yang didanai melalui skema dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Renstra perangkat daerah harus mempertimbangkan Renstra Pemerintah Provinsi sebagai dokumen acuan di level suprad daerah.
4. **Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah**  
Renja merupakan penjabaran tahunan dari Renstra dan berfungsi sebagai instrumen implementasi program dan kegiatan secara periodik. Sinkronisasi antara Renstra dan Renja mutlak diperlukan agar konsistensi capaian sasaran kinerja dapat terjaga setiap tahun.
5. **RKPD dan KUA-PPAS**  
Renstra juga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), yang berfungsi sebagai dokumen kebijakan tahunan dan dasar penganggaran. Dengan demikian, integrasi antara perencanaan strategis dan penganggaran dapat diwujudkan secara sistematis.

Berikut adalah Hubungan Keterkaitan antara Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L, Renja Perangkat Daerah.



Gambar 2. Hubungan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Pemerintah Provinsi dan Renja Perangkat Daerah

Dengan demikian, dokumen Renstra ini tidak hanya memuat arah dan langkah teknokratis untuk mencapai target sektoral, tetapi juga merupakan wujud nyata dari akuntabilitas publik dan transparansi perencanaan. Renstra menjadi instrumen strategis yang merefleksikan komitmen Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan visi pembangunan daerah, berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Lebih dari itu, penyusunan Renstra ini menegaskan semangat untuk mewujudkan tata kelola pembangunan sektor pangan, pertanian, dan perikanan yang partisipatif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; inklusif, dengan memperhatikan kelompok rentan, pelaku usaha kecil, serta komunitas lokal; dan berorientasi pada hasil, melalui penguatan indikator kinerja yang terukur dan terpantau secara berkelanjutan.

Renstra ini juga menjadi landasan konsolidasi lintas sektor dan antarlevel pemerintahan, dalam rangka mendorong transformasi sistem pangan yang tangguh, produktivitas pertanian yang berkelanjutan, serta pemanfaatan sumber daya perikanan yang berwawasan lingkungan. Dengan pendekatan ini, diharapkan Renstra bukan hanya menjadi dokumen perencanaan administratif, tetapi juga motor penggerak perubahan menuju kemandirian dan ketahanan pangan daerah.

**1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan kewajiban setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Renstra disusun sebagai penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima tahun.

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
6. Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025–2029.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan sektoral yang berfungsi sebagai pedoman strategis bagi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pangan, pertanian, dan perikanan. Renstra ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan, sasaran prioritas, serta program dan kegiatan selama periode lima tahun mendatang yang selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Balikpapan.

Renstra juga dimaksudkan sebagai instrumen untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan lintas bidang dalam satu kerangka kebijakan yang utuh, konsisten, dan dapat diukur pencapaiannya secara periodik.

Tujuannya adalah :

- Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah terpilih ke dalam rencana operasional perangkat daerah yang bersifat teknis dan aplikatif;
- Menyusun arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan prioritas sektor pangan, pertanian dan perikanan secara sistematis, berdasarkan analisis permasalahan, potensi, dan kebutuhan masyarakat;
- Menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di sektor yang menjadi kewenangan Dinas, guna memastikan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja;
- Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah serta penyusunan dokumen penganggaran daerah seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan melalui penetapan indikator kinerja utama (IKU) dan sasaran strategis yang jelas dan terukur;
- Mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan berbasis hasil dalam pengelolaan urusan pangan, pertanian dan perikanan.

Dengan tujuan tersebut, Renstra ini diharapkan menjadi dokumen yang mampu memberikan arah pembangunan sektoral yang responsif terhadap dinamika lokal dan regional serta mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan secara adaptif dan inovatif.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I – Pendahuluan : Latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
2. BAB II - Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
3. BAB III – Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan: Tujuan, Sasaran, Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.
4. BAB IV - Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan : Uraian Program, kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, target, dan pendanaan.
5. BAB V – Penutup : Kesimpulan, Kaidah Pelaksanaan, Pelaksanaan Pengendalian dan evaluasi.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **A. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan, pertanian dan perikanan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Tugas pokok dan fungsi diatur dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

##### **Tugas Pokok :**

Membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.

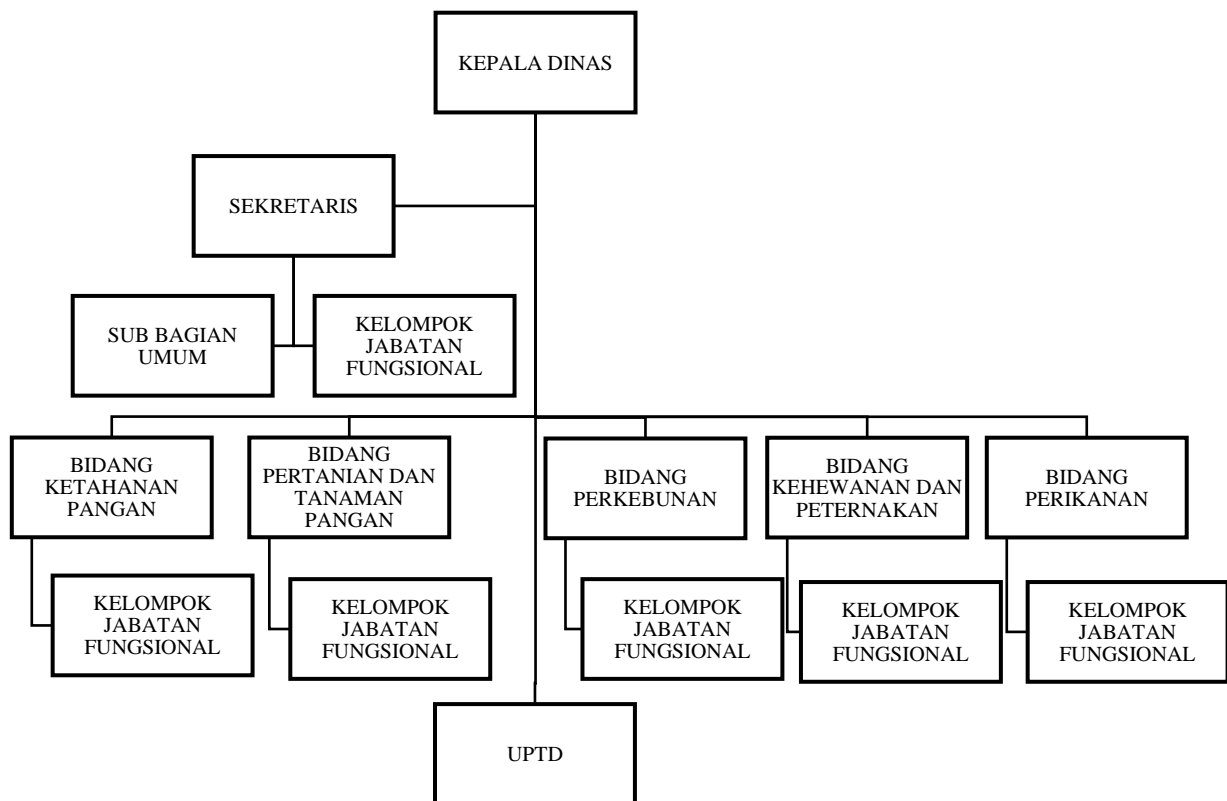
##### **Fungsi :**

1. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di bidang pangan, pertanian dan perikanan;
2. Penyusunan rumusan kebijakan di bidang pangan, pertanian dan perikanan;
3. penyusunan standar pembibitan/pembenihan yang menjadi kewenangan Daerah;
4. Pemberian layanan, pengawasan dan pengendalian izin usaha bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan;
5. Pelaksanaan pembinaan bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan;
6. Pelaksanaan penerapan teknologi bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan yang meliputi teknologi di tingkat petani/nelayan;
7. Pengelolaan UPTD;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
9. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan terdiri dari :**

- Sekretariat
- Bidang Ketahanan Pangan
- Bidang Pertanian dan Tanaman Pangan
- Bidang Perkebunan
- Bidang Kehewanan dan Peternakan
- Bidang Perikanan
- Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Potong Hewan

Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang dan didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang mengampu tugas teknis.



Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan

**B. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan didukung oleh sumber daya Perangkat Daerah yang meliputi sumber daya manusia (SDM), keuangan, sarana prasarana, serta sistem informasi dan teknologi yang tersedia.

**1. Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi. SDM dengan kinerja yang baik akan berperan langsung dalam pencapaian tujuan dinas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, hingga evaluasi. Keberhasilan ini hanya dapat dicapai apabila pengelolaan SDM dilakukan secara optimal, terarah, dan berkelanjutan. Kualitas serta kemampuan kompetitif pegawai, baik di bidang ketahanan pangan, pertanian, maupun

perikanan, menjadi faktor penentu bagi efektivitas program dan layanan publik yang diberikan kepada masyarakat Kota Balikpapan.

Dalam menjalankan kegiatan organisasi Sumber Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan berdasarkan struktur organisasi tersebut di atas, terdistribusi dalam jabatan struktural, jabatan fungsional umum/pelaksana, jabatan fungsional tertentu, dan staf non ASN. Adapun rincian SDM Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan per 31 Juli 2025 adalah sebagaimana Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Profil Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Kondisi Per 31 Juli 2025

KLASIFIKASI	PNS	PPPK	NON ASN	JUMLAH
<b>JENIS KELAMIN</b>				
Laki-laki	25	18	8	51
Perempuan	31	20	3	54
<b>UMUR</b>				
>50	24	5	4	33
40-49	22	15	2	39
30-39	8	15	1	24
20-29	2	3	4	9
Jumlah	56	38	11	105
<b>PENDIDIKAN</b>				
S3				
S2	5	-	-	5
S1	35	15	4	54
D4	1	-	1	2
D3	4	3	-	7
SMA/SMK	8	15	1	24
SMP	3			3
SD	-	5	5	10
Jumlah	56	38	11	105
<b>JENIS JABATAN</b>				
Struktural	10	-	-	10
Fungsional	23	18	-	41
Pelaksana	23	20	-	43
Jumlah	56	38	-	94
<b>ESSELON</b>				
II B	1	-	-	1
III A	1	-	-	1
III B	5	-	-	5
IV A	2	-	-	2
IV B	1	-	-	1
Jumlah	10	-	-	10
<b>GOLONGAN/PANGKAT/RUANG PNS</b>				
IV C	1	-	-	1
IV B	1	-	-	1
IV A	7	-	-	7
III D	20	-	-	20
III C	3	-	-	3
III B	9	-	-	9
III A	8	-	-	8
II D	2	-	-	2
II C	-	-	-	-
II B	2	-	-	2
II A	1	-	-	1
Jumlah	56	-	-	56
<b>GOLONGAN PPPK</b>				
X	-	2	-	2
IX	-	13	-	13
VIII	-	-	-	-
VII	-	3	-	3
VI	-	-	-	-

KLASIFIKASI	PNS	PPPK	NON ASN	JUMLAH
V	-	15	-	15
IV	-	-	-	-
III	-	-	-	-
II	-	-	-	-
I	-	5	-	5
Jumlah	-	38	-	38

Sumber Data : Bagian Umum , DKP3

## 2. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor strategis dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan dalam urusan pangan, pertanian, dan perikanan. DKP3 Kota Balikpapan memerlukan dukungan anggaran yang memadai, berkelanjutan, dan tepat sasaran agar target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dapat diwujudkan secara efektif.

Pendanaan kegiatan Dinas selama ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan, serta dukungan program melalui transfer pusat/provinsi, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bantuan Keuangan (Bankeu).

Ketersediaan anggaran yang masih terbatas menjadi tantangan nyata dalam pengembangan program-program inovatif, perluasan layanan berbasis kawasan, serta penyediaan infrastruktur yang mendukung peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan strategi pengelolaan sumber daya keuangan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Dinas perlu mengembangkan berbagai pendekatan untuk memperluas basis pendanaan pembangunan, di antaranya:

1. Mendorong skema pembiayaan alternatif melalui kemitraan publik-swasta (*public-private partnership*), pemanfaatan dana CSR (*corporate social responsibility*).
2. Mengakses sumber pendanaan dari pusat dan provinsi, termasuk dana Alokasi Khusus (DAK), ataupun Bantuan Keuangan (Bankeu) ;
3. Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran melalui perencanaan berbasis kinerja dan evaluasi berbasis output–outcome;
4. Membangun kapasitas kelembagaan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan, termasuk penguatan sistem informasi, pelaporan keuangan, dan tata kelola anggaran yang akuntabel;
5. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan advokasi perencanaan dalam forum pembangunan daerah, guna memastikan sinergi program serta dukungan politik-anggaran dari pemangku kepentingan.

Dengan penguatan strategi pengelolaan keuangan tersebut, diharapkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dapat lebih fleksibel dan responsif dalam menghadapi dinamika pembangunan daerah, termasuk dalam menjawab tantangan kebutuhan pangan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) yang secara geografis berdekatan dan saling berpengaruh dengan Kota Balikpapan.

## 3. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan secara optimal,

ketersediaan sarana dan prasarana menjadi elemen penting yang tidak terpisahkan. Sarana dan prasarana berfungsi sebagai penunjang pelaksanaan program, penyediaan layanan publik, serta pusat inovasi dan pengembangan sektor pangan, pertanian, dan perikanan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan memiliki sejumlah sarana penunjang pelaksanaan tugas, di antaranya sebagai berikut :

Tabel 2. Sarana dan Prasarana DKP3 Kota Balikpapan Tahun 2025

No	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp	
1	A.C. Split	41	Rp220.708.840	
2	A.C. Window	18	Rp131.741.500	
3	Air Blower	1	Rp6.250.000	
4	alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang lainnya (dst)	1	Rp19.360.000	Pelampung / Perikanan
5	alat bengkel bermesin lainnya lainnya (dst)	2	Rp11.061.250	- MESIN PENJAHIT KARUNG (BBI) - ALAT PENGEPRES OLAHAN LADA (PERKEBUNAN)
6	Alat Dapur lainnya	3	Rp24.146.700	- 2 buah ambal - MEJA KOMPOR - Pemasangan Wastafel RPH
7	Alat Hiasan	1	Rp575.000	*peta Wilayah Droning Bappeda
8	Alat Kantor Lainnya	43	Rp128.617.500	- Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga ( Pengadaan Meubelair ) - Pengadaan Lemari Arsip - Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga - Pengadaan Lemari Arsip - kursi tunggu - lemari arsip - MEJA LIPAT (KETAHANAN PANGAN) - LEMARI ARSIP BESI (SEKRETARIAT) - tiang umbul umbul - Cobra (Brankas)
9	Alat Kedokteran umum lainnya	15	Rp21.927.000	- / Tabung Oksigen - Thermogun - / Tang Aplicator - AM. Electrical
10	alat kesehatan kebidanan dan penyakit	1	Rp960.000	

No	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp	
	kandungan lainnya (dst)			
11	alat kesehatan kerja lainnya (dst)	2	Rp99.110.000	- Belanja Modal Pengadaan alat medik Puskesmas ( Mikroskop plus Camera ) - Belanja Modal Pengadaan alat medik puskesmas ( centrifuge )
12	Alat Khusus SAR ( Search And Resque )	1	Rp5.940.000	20 unit baju life jacket / Perikanan
13	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	1	Rp14.465.000	- / Radio SSB
14	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	1	Rp4.950.000	- / Software Aplikasi Berbasis WEB
15	alat laboratorium bahan bangunan konstruksi lainnya (dst)	2	Rp4.345.000	- / Wall Scren/Layar Flim - / Screen Proyektor
16	alat laboratorium farmasi lainnya (dst)	1	Rp111.677.500	- / Alat - Alat Laboratorium Peternakan
17	Alat Laboratorium lainnya	5	Rp1.072.750.200	- / Alat-Alat Laboratorium - Alat Teknis+Peralatan Inseminasi Buatan+Peralatan
18	alat laboratorium makanan lainnya (dst)	3	Rp2.363.900	- / Cooler Box Caps - COOLER BOX (DISTRIBUSI PANGAN)
19	alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya (dst)	1	Rp300.000	- / Mixer
20	alat laboratorium microbiologi lainnya (dst)	1	Rp500.000	
21	alat laboratorium patologi lainnya (dst)	5	Rp44.784.000	- / Freezer - / Freezer - / Glassdoor Freezer Sanyo / Frezer - / Freezer

No	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp	
22	alat laboratorium umum lainnya (dst)	3	Rp345.070.000	- Alat Laboratorium Kesmavet "Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran - Pengadaan Alat USG Veteriner" "Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran - Pengadaan Printer USG Veteriner"
23	alat pasca panen lainnya (dst)	1	Rp40.200.000	Kawasan Agro Wisata Km.23
24	Alat Pemadam/Portable	11	Rp21.513.800	TABUNG PEMADAM KEBAKARAN PORTABLE
25	Alat Pemanas Ruangan	1	Rp750.000	- / Alat Pemanas
26	alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya (dst)	1	Rp9.460.000	Pengadaan Percontohan sistem verticulture bidang Tanaman Pangan dan Hortikulture
27	Alat Pemipil Jagung	1	Rp48.510.000	
28	Alat Pendingin lainnya	8	Rp24.526.500	Freezer Display  Lemari Pendingin Cooler Box
29	Alat Penggiling Padi	1	Rp43.037.500	
30	Alat Penghancur Kertas	1	Rp6.930.000	
31	Alat Pengolahan lainnya	3	Rp104.445.000	- Alat Benih/Penetasan Larva..BBI Tritip Bidang Perikanan dan Kelautan - Belanja Modal Pengadaan Alat Produksi Perikanan
32	alat pengolahan tanah dan tanaman lainnya (dst)	1	Rp57.123.000	- Belanja modal pengadaan alat pengolahan tanah dan tanaman ( Cultivator ) - Hand Traktor
33	Alat Pengukur P.H. Tanah (Soil Tester)	6	Rp5.740.000	
34	Alat Pengukur Massa Jenis	1	Rp6.435.000	Digital / Alat Pengukur Derajat Kemanisan

No	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp	
35	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa menengah lainnya (dst)	2	Rp590.000	- / Gunting - / Gunting Bedah standar
36	alat peraga praktek sekolah bidang studi : matematika lainnya (dst)	1	Rp10.000.000	- / Pipa Plastik 25 Batang
37	Alat Perangkap Binatang	2	Rp44.500.000	- / Jaring Perangkap Keswan
38	Alat Peternakan lainnya	1	Rp22.275.000	TIMBANGAN DIGITAL SAPI (RPH)
39	Alat Produksi Perikanan lainnya	16	Rp288.855.689	- / Alat Pengaduk Pakan Ikan - / Alat Pengering Palet Ikan - / Alat pencetak palet ikan - / Fishmeat Bone Separator - / Perlengkapan Penunjang BBI TPI - / Mesin Airator (penghasil udara) - / - - / - Mesin Pompa Air/Tandon / - Henhai / Redhand Flare
40	Alat Rumah Tangga Lain-lain	24	Rp245.272.300	- / Kain gordyn Gordyn dan Tirai / - - / Teralis Jendela dan Pintu teralis Jendela Pintu / - Gorden dan Trai / Alat Rumah Tanggal Lainnya - / Teralis Jendela dan Pintu - / Gorden - / Ambal (Karpet) - Belanja Modal Pengadaan Alat Pompa Air RPU Kesmavet - Belanja Modal Pengadaan Tandon RPU - Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use) - Mesin POMPA Air BBI Tritip



No	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp	
				- Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Areal Pembibitan Kariangau - Belanja Modal Pengadaan Tandon RPH - Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa areal Agrowisata KM.23 Karang Joang - Belanja Modal Pengadaan Tandon - Kegiatan Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Hortikultura
41	Alat Selam	1	Rp117.194.000	- / Peralatan Selam
42	Alat Studio Pemetaan lainnya	3	Rp20.470.000	"Belanja Modal Pengadaan Alat Studio - Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur" "Belanja Modal Pengadaan Alat Studio - Pengadaan GPS"
43	alat timbangan/biara lainnya (dst)	1	Rp2.498.700	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use ) Meja Timbangan Pembibitan
44	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	3	Rp7.744.000	- Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya - alat ukur ph meter 4 unit - Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya TPI
45	alat ukur universal lainnya (dst)	1	Rp7.370.000	GPS
46	Analytical Balance Electric	1	Rp29.400.000	
47	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	Rp1.000.000	
48	Audio Amplifier	1	Rp1.210.000	Simbadda / Speaker Aktif
49	Backpack Pump (Pompa Punggung Besar)	2	Rp8.767.000	POMPA PUNGGUNG BESAR (PERKEBUNAN) Mist Blower
50	Bak Air	16	Rp28.570.000	- / Tandon Air
51	Bak Fiberglass	4	Rp15.400.000	

No	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp	
52	Bak Pendingin	70	Rp206.068.500	- / Cool Box HDPE - / Box Pendingin - / Cool Box
53	Bangku Tunggu	3	Rp6.380.000	
54	Blender	1	Rp1.100.000	
55	Brandkas	11	Rp77.499.750	
56	Buffet Kaca	3	Rp14.850.000	
57	Camera Conference	1	Rp6.660.000	HD VIDEO CAMERA / CE3 HSD-VC203
58	Camera Electronic	24	Rp152.034.200	
59	Camera Scope	1	Rp11.330.000	Canon / Camera DSLR
60	CCTV - Camera Control Television System	10	Rp173.673.500	
61	Cold Storage (Kamar Pendingin)	1	Rp88.000.000	
62	Colony Counter (Alat Laboratorium Pertanian)	1	Rp11.000.000	COLONY COUNTER (KESMAVET)
63	Compact Disc Player	2	Rp1.320.000	
64	Container	6	Rp75.405.000	- / Container IB 50 ltr - / Container IB 20 ltr - / Container IB 1,5 ltr
65	Container N2 Cair (Alat Laboratorium Pertanian)	6	Rp132.645.000	- POMPA NITRGEN CAIR - CONTAINER N2 (BINUS PETERNAKAN)
66	Crane (500 Kg)	1	Rp107.305.000	RPH
67	Crusible Penyaring	20	Rp500.000	- / Tabung Reaksi
68	Detector	20	Rp96.140.000	- / Fish Finder
69	Dispenser	12	Rp24.471.540	
70	Distiling Apparatus	41	Rp337.427.498	- HP / Computer + meja (built computer) - Acer / Core 2 duo - HP / Desktop HP P6330L - HP / Desktop HP P6330L - HP / Desktop HP P6330L HP / - - HP / Personal Komputer - Compaq / Desctop PC - Asus / Desktop Komputer - Asus
71	DO Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	3	Rp22.473.000	

No	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp	
72	Dry Heat Oven Electrophoresis Kit, Consist Of	1	Rp16.500.000	DAK Perikanan
73	electric generating set lainnya (dst)	1	Rp98.516.000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Geset PPI/TPI Manggar
74	External	1	Rp550.000	
75	Facsimile	10	Rp19.137.500	
76	Filing Cabinet Besi	18	Rp29.106.400	
77	Finger Print Camera	7	Rp44.289.000	
78	Fire Extinghuizer	1	Rp3.850.000	
79	Fire Extinguisher	5	Rp21.120.000	
80	Gambar Analitik	5	Rp2.000.000	Walikota/Wakil Walikota / Figura
81	Gambar Presiden/Wakil Presiden	5	Rp2.000.000	
82	Gas Chromatography High Resolution Time of Flight Mass Spectrometer	5	Rp28.138.000	Belanja Modal Pengadaan Unit - Unit Laboratorium - Pengadaan Alat Uji Formalin
83	Gear Box Sun Assy	10	Rp34.200.000	- Advance / Gear box Prod. Perikanan
84	Generator Set (Lab Scale)	1	Rp13.200.000	Excell / Genset
85	Gergaji Chain Saw	4	Rp21.472.000	
86	Gerobak Dorong	9	Rp6.463.000	Arco
87	Global Positioning System	23	Rp79.150.000	- / GPS Garmin 12
88	Gordyin/Kray	7	Rp122.013.700	
89	Grating Generator Unit	1	Rp199.980.000	
90	Handy Cam	7	Rp56.985.500	
91	Handy Talky (HT)	6	Rp11.550.000	
92	Jaring Angkat Lainnya	6	Rp290.400.000	
93	Kapal Motor	12	Rp93.600.000	- / Mesin Kapal 12 Unit 30 PK
94	Kapal Patroli Pantai	1	Rp25.000.000	
95	Kardex Kayu	1	Rp50.000	
96	Karpet	2	Rp2.490.000	
97	kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	2	Rp754.120.000	- Toyota/HILUX DOBLE CABIN (Perikanan) - Toyota Hi-Lux Dable Cabin (Sekretariat)
98	Keramba ( Jaring Apung )	12	Rp656.987.034	
99	Kipas Angin	20	Rp18.638.830	

No	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp	
100	Kompor Gas (Alat Dapur)	7	Rp6.479.100	
101	Kompor Minyak	1	Rp200.000	
102	Komputer Jaringan lainnya	7	Rp52.360.000	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC
103	Komputer Unit Lainnya	1	Rp54.230.000	
104	Kursi Besi/Metal	15	Rp32.328.450	
105	Kursi Fiber Glas/Plastik	10	Rp2.530.000	
106	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	25	Rp28.544.200	
107	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Rp5.439.000	
108	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Rp1.980.000	
109	Kursi Kerja Pejabat lainnya	22	Rp33.169.700	
110	Kursi Lipat	30	Rp8.580.000	
111	Kursi Putar	3	Rp6.644.000	
112	Kursi Rapat	94	Rp56.639.000	
113	Kursi Tamu	6	Rp16.396.450	
114	Lap Top	14	Rp185.771.400	
115	Layar Film/Projector	8	Rp90.035.300	
116	LCD Projector/Infocus	1	Rp1.425	
117	Lemari Besi/Metal	15	Rp69.076.000	
118	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	10	Rp37.369.000	
119	Lemari Es	14	Rp59.516.500	
120	Lemari Kaca	7	Rp30.605.900	
121	Lemari Kayu	7	Rp20.700.000	
122	Lemari Penyimpan	12	Rp85.324.000	
123	Lori Dorong	2	Rp6.600.000	
124	Loudspeaker	2	Rp18.840.600	
125	Meja 1/2 Biro	23	Rp34.515.500	
126	Meja Kerja	47	Rp53.373.000	
127	Meja Kerja Kayu	24	Rp57.846.350	
128	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10	Rp27.775.000	
129	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Rp9.937.500	
130	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6	Rp9.540.000	

No	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp	
131	Meja Kerja Pejabat lain-lain	4	Rp7.999.200	
132	Meja Kerja Stainless	1	Rp6.435.000	
133	Meja Komputer	9	Rp7.326.000	
134	Meja Periksa Pasien	2	Rp2.000.000	
135	Meja Rapat	17	Rp64.240.000	
136	Meja Resepsionis	2	Rp11.605.000	
137	Meja Tamu Biasa	1	Rp1.200.000	
138	Mesin Absensi	7	Rp110.770.000	
139	Mesin Bor Tangan	2	Rp9.700.000	
140	Mesin Cuci	4	Rp12.230.600	
141	Mesin Fotocopy Lainnya	1	Rp54.450.000	
142	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	10	Rp4.646.900	
143	mesin hitung/mesin jumlah lainnya (dst)	1	Rp4.950.000	
144	mesin ketik lainnya (dst)	11	Rp32.227.000	
145	Mesin Ketik Listrik	1	Rp3.575.000	
146	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	Rp3.850.000	
147	Mesin Pembuat Es	1	Rp607.218.150	
148	Mesin Pembuat Pellet	1	Rp40.535.000	
149	Mesin Pemotong Biasa	1	Rp5.830.000	Mesin pemotong dahan tinggi (Hortikultura)
150	Mesin Pemotong Rumput	14	Rp58.678.000	
151	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	5	Rp7.480.000	
152	Mesin Pres Jerami	2	Rp88.110.000	- / Mesin Pemnbuat Kompos
153	mesin proses lainnya (dst)	3	Rp26.323.200	- MESIN WRAPING (DISTRIBUSI PANGAN) - MESIN CUP SEALER (DISTRIBUSI PANGAN) - Mesin Penghancur Bahan Pupuk Organik (Crusher)
154	Mesin Vacum Trockner Dryne	1	Rp888.800	VACUM SEALER
155	Mesin Winding	4	Rp19.800.000	Mesin Winding
156	Meubeleur lainnya	7	Rp9.634.600	- / Locker
157	Microphone	1	Rp2.090.000	

No	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp	
158	Microphone Floor Stand	1	Rp1.488.300	
159	Microphone/Boom Stand	1	Rp7.463.500	
160	Mikroskop	2	Rp75.900.000	
161	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	3	Rp301.710.000	- Suzuki / ST 150 - Suzuki / ST 150 - Suzuki / Carry
162	Mobil Workshop	1	Rp174.550.000	Nwe Avanza / 1.5G M/T
163	Moister Meter	1	Rp250.000	
164	Note Book	60	Rp772.090.900	
165	Oven Listrik	1	Rp2.200.000	
166	P.C Unit	19	Rp149.364.270	
167	Packaging Machine	1	Rp22.660.000	- / Continius Scaler Paking Aging
168	Pan Mixer	1	Rp935.000	
169	Pancing Lainnya	25	Rp136.125.000	- / Pancing Rawai
170	Papan Nama Instansi	9	Rp15.438.200	
171	Papan Panel	2	Rp21.525.020	- / Papan Panel/Nama - / Papan Data Kantor
172	Papan Pengumuman	4	Rp70.867.000	Papan Informasi Pangamanan Hutan Kota
173	Papan Tulis	1	Rp150.000	
174	Papan Visual/Papan Nama	1	Rp4.400.000	PAPAN STANDAR PELAYANAN KLINIK HEWAN
175	Penagas	1	Rp19.800.000	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Hewan
176	Penetrometer (Alat Laboratorium Pertanian)	1	Rp250.000	
177	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	9	Rp12.835.000	
178	Peralatan Personal Komputer lainnya	1	Rp1.265.000	Eksternal Hardisk
179	peralatan studio audio lainnya (dst)	11	Rp75.795.500	- Canon / Powershoot A2300 - sony / HDR Pj 230E - Nikon / L.28 - CANNON - CANNON / DSLR 20000 24,1 MP - EPSON - CANARE - PSB-30 / PSB - 30
180	perkakas pabrik es lainnya (dst)	1	Rp12.940.000	Belanja Modal Pengadaan Perakass Pabrik Es

No	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp	
181	Personal Computer (PC)	3	Rp38.400.000	
182	Pesawat Telephone	3	Rp784.000	
183	Peta	2	Rp1.500.000	
184	PH Meter (Alat Ukur Universal)	8	Rp50.464.000	
185	Pick Up	6	Rp949.300.000	- Toyota / Kijang KF 60 - Mitsubishi / Strada 2,5L GLS - Toyota / Hilux Pick Up 2.0(TGN10R-TRMD - Toyota / Hilux Pick Up 2.0(TGN10R-TMRD - SUZUKI / AE415W CX (4X2) MT - SUZUKI / AE415W CX (4X2) MT
186	Pompa Air	17	Rp166.224.700	
187	pompa lainnya (dst)	6	Rp40.986.000	
188	Pompa Lumpur	2	Rp17.626.800	
189	Portable Generating Set	5	Rp80.549.000	Mitsubishi MDE + ATS / Genset Mitsubishi MDE + PANEL / Genset KAMA / Genset
190	Portable Water Pump	19	Rp107.150.000	
191	Printer (Peralatan Personal Komputer)	42	Rp165.172.850	
192	Rak Besi	8	Rp21.186.000	- / Rak Penyimpan - VIP / Rak Buku
193	Rak Kayu	8	Rp9.347.300	
194	Rak Peralatan	4	Rp4.927.300	- / Rak Arsip - / Rak Klinik
195	Rak-Rak Penyimpan	1	Rp28.160.000	Loker/Rak+Filling Kabinet
196	rambu bersuar lainnya (dst)	1	Rp156.721.000	Pembangunan Jalan Inspeksi Hutan Kota Kawasan Hutan Lindung
197	Rambu/Bak Ukur	1	Rp28.692.400	- / Rambu DPML
198	Reach In Chiller	1	Rp57.200.000	REFRIGERATOR VAKSI (KESWAN)
199	recorder display lainnya (dst)	6	Rp46.161.500	epson / L210
200	Refractometer (Alat Laboratorium Umum)	4	Rp7.548.000	- / Salinity Refractometer
201	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	Rp69.300.000	
202	Senapan Angin	4	Rp7.999.200	
203	Sepeda Motor	117	Rp1.387.674.700	

No	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp	
204	Signal Generator (Alat Laboratorium Fisika)	4	Rp1.430.000	Henhai / Parachute Signal
205	Smoke Detecting System & Alarm	2	Rp715.000	Henhai / Smoke Signal
206	Sofa	21	Rp135.210.000	
207	Soil PH Meter	3	Rp8.085.000	
208	Sound System	1	Rp34.100.000	
209	Speading Machine	15	Rp114.988.500	Yanmar / Mesin Kapal 24 PK
210	Speed Boat / Motor Tempel	2	Rp88.550.000	
211	Stabilizer	4	Rp16.346.000	Flazer / Stavolt
212	Station Wagon	7	Rp895.350.000	- Toyota / Avanza G - M/T - Toyota / Avanza S - M/T - Toyota / New Avanza 1,5 - Toyota / New Avanza Veo - toyota Inova
213	Tabung Gas	2	Rp2.447.500	- / LPG
214	Tangga Aluminium	8	Rp19.709.000	
215	Tangki Meter	4	Rp4.000.000	
216	Telephone (PABX)	1	Rp37.666.200	
217	Televisi	7	Rp37.314.000	
218	Tempat Tidur Kayu	13	Rp16.830.000	
219	Tenda	10	Rp18.150.000	SOLEIL/SETARA / FOLDING GAZEBO
220	Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya)	2	Rp3.740.000	
221	Tiang Bendera	6	Rp15.180.000	
222	Timbangan Elektronik	1	Rp1.269.400	
223	Timbangan Gantung Kapasitas 50 Gram	3	Rp1.200.000	
224	Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg	4	Rp11.800.000	
225	tractor lainnya (dst)	1	Rp25.000.000	
226	Transportable Water Pump	1	Rp9.980.300	Bidang kehewanan pertanian rekllas dari jalan jaringan dan irigasi
227	Ultra Sono Graphy (USG) Internal Medicine	1	Rp48.648.600	



No	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp	
228	Uninterruptible Power Supply (UPS)	36	Rp37.869.500	
229	Valve Spring Tester	1	Rp1.800.000	- / Check Valve 1 Paket
230	White Board	12	Rp12.905.500	
231	Wireless	9	Rp61.571.000	
232	Wireless Control System For Ship Model	1	Rp2.500.000	
TOTAL		1841	Rp16.982.753.596	

Sumber : Sub Bagian Umum, April 2025

Meskipun sarana tersebut telah tersedia, tantangan yang dihadapi saat ini meliputi keterbatasan kapasitas dan modernisasi fasilitas. Sebagian peralatan belum didukung oleh teknologi mutakhir, masih bersifat manual atau semi-mekanis, serta memerlukan peremajaan. Selain itu, penyebaran fasilitas masih belum merata, terutama pada wilayah kecamatan dengan akses sulit atau kawasan pertanian baru.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas perlu mengembangkan strategi sebagai berikut:

- Modernisasi sarana dan prasarana melalui pemanfaatan teknologi digital dan otomatisasi;
- Penambahan cold storage dan infrastruktur logistik pangan berbasis kawasan;
- Optimalisasi fungsi UPTD sebagai pusat layanan teknis dan edukasi masyarakat;
- Peningkatan kerja sama dengan pihak swasta, BUMD, dan perguruan tinggi untuk penyediaan dan pengelolaan fasilitas bersama.

Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan modern, diharapkan peran Dinas dalam menjamin ketahanan pangan, meningkatkan produksi, serta mendukung kesejahteraan pelaku utama pertanian dan perikanan dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

#### **4. Sistem Informasi dan Teknologi**

Dinas telah mengembangkan beberapa sistem informasi internal untuk mendukung pengumpulan data dan pelaporan kegiatan, seperti:

- Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKEPANG);
- Aplikasi monitoring ketersediaan pangan dan harga pasar;
- Dashboard capaian program melalui google drive dan aplikasi REAKSI;

Namun, pemanfaatan teknologi digital untuk layanan publik seperti penyuluhan daring, pelatihan petani secara virtual, serta sistem e-logistik pangan masih terbatas dan menjadi ruang pengembangan strategis dalam lima tahun ke depan.

### **C. Unit Usaha Operasional**

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan tidak hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator kebijakan pembangunan sektor pangan, pertanian, dan perikanan, tetapi juga mengelola beberapa unit usaha operasional yang memiliki fungsi strategis dalam menunjang pelayanan publik dan keberlanjutan ekonomi daerah. Unit-unit ini menjalankan fungsi pelayanan teknis, produksi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat secara langsung. Beberapa unit usaha operasional yang dimiliki oleh Dinas antara lain:

#### **1. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Potong Hewan (RPH)**

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Potong Hewan (RPH) sebagai salah satu infrastruktur strategis dalam menjamin penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) bagi masyarakat. UPTD RPH berperan penting tidak hanya sebagai fasilitas pemotongan ternak, tetapi juga sebagai simpul pengawasan kesehatan hewan, pelaksanaan pemotongan sesuai syariat, serta pengendalian penyakit zoonosis.

Sebagai unit teknis operasional, RPH dilengkapi dengan fasilitas pemotongan untuk sapi dan kambing, serta memiliki tenaga paramedis veteriner yang bertugas melakukan ante-mortem dan post-mortem inspection guna memastikan setiap hewan yang dipotong memenuhi standar kesehatan dan kelayakan konsumsi. Proses pemotongan dilaksanakan sesuai dengan kaidah kesejahteraan hewan dan diawasi langsung oleh dokter hewan pemerintah.

UPTD RPH juga memiliki peran sebagai pendukung kebijakan ketahanan pangan, khususnya dalam menjamin pasokan protein hewani yang layak dan terjangkau. Selain itu, keberadaan RPH turut mendukung pengendalian lalu lintas ternak dan pemotongan liar, yang berpotensi menjadi sumber penyebaran penyakit hewan dan produk asal hewan yang tidak memenuhi standar. Selama lima tahun terakhir, RPH telah mengalami berbagai penguatan, antara lain:

- Rehabilitasi bangunan dan penambahan peralatan pemotongan.
- Koordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait aspek kehalalan.
- Pembinaan kepada jagal dan pelaku usaha daging.

Namun demikian, tantangan masih dihadapi terkait kapasitas daya tampung ternak saat hari besar keagamaan, keterbatasan ruang dingin (cold storage), serta kebutuhan peningkatan sertifikasi NKV (Nomor Kontrol Veteriner). Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, peningkatan SDM, serta revitalisasi sarana-prasarana menjadi fokus arah kebijakan pengembangan UPTD RPH ke depan.

Keberadaan UPTD RPH yang profesional dan modern merupakan bagian integral dari sistem layanan publik yang berorientasi pada perlindungan konsumen, pengendalian risiko kesehatan, dan peningkatan nilai tambah sektor peternakan di Kota Balikpapan.

## **2. Klinik Hewan**

Sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan yang terjangkau, profesional, dan berstandar, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan menyelenggarakan Klinik Hewan sebagai fasilitas layanan teknis langsung kepada masyarakat. Klinik ini beroperasi di bawah pengelolaan Bidang Kehewan dan Peternakan, dengan fokus utama pada pelayanan kesehatan hewan kesayangan, ternak, dan hewan penular rabies. Klinik Hewan menyediakan berbagai layanan seperti:

- Pemeriksaan dan pengobatan umum hewan.

- Vaksinasi.
- Sterilisasi dan tindakan bedah minor.
- Konsultasi kesehatan hewan.
- Penanganan kasus zoonosis dan pengawasan hewan yang berpotensi menularkan penyakit kepada manusia.

Klinik ini juga menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran terhadap kesejahteraan hewan (animal welfare), pentingnya vaksinasi rutin, serta penanganan hewan peliharaan yang bertanggung jawab. Pelayanan diberikan oleh tenaga dokter hewan dan paramedis veteriner yang tersertifikasi, serta didukung oleh sarana diagnostik dasar.

Selama beberapa tahun terakhir, Klinik Hewan mengalami peningkatan volume pelayanan, khususnya pada momen Hari Rabies Sedunia dan saat pelaksanaan program vaksinasi massal. Klinik juga aktif dalam kolaborasi dengan komunitas pecinta hewan, relawan penyelamat satwa, dan lembaga pendidikan untuk mendorong partisipasi aktif dalam pengendalian rabies dan kesejahteraan hewan.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan ruang perawatan inap, minimnya alat diagnostik lanjutan, serta fluktuasi permintaan layanan di luar hari kerja. Ke depan, pengembangan Klinik Hewan diarahkan pada:

- Digitalisasi pendaftaran dan rekam medis hewan.
- Penambahan jadwal layanan luar gedung (jemput bola).
- Peningkatan SDM dan peralatan diagnostik.
- Integrasi dengan layanan pengendalian populasi hewan liar dan rabies berbasis wilayah.

Klinik Hewan menjadi bagian integral dari sistem pelayanan publik yang tidak hanya melindungi hewan, tetapi juga menjaga kesehatan masyarakat secara umum melalui pendekatan One Health, yang mengaitkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.

### **3. Pembibitan**

Dalam mendukung penguatan sektor pertanian di Kota Balikpapan, Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan memiliki unit pembibitan yang dikelola oleh Bidang Pertanian dan Tanaman Pangan (PTP). Unit ini berperan sebagai salah satu sarana strategis dalam penyediaan benih dan bibit unggul yang berkualitas untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian, khususnya tanaman hortikultura.

Keberadaan unit ini menjadi penting mengingat tingginya ketergantungan petani terhadap pasokan benih dari luar daerah, serta kebutuhan akan kemandirian benih sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Dalam lima tahun terakhir, unit pembibitan terus mengalami peningkatan kapasitas melalui rehabilitasi fasilitas, pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta penguatan SDM teknis. Namun, untuk mendorong optimalisasi fungsinya, masih diperlukan dukungan tambahan dalam hal pengembangan infrastruktur

pendukung, sertifikasi benih secara reguler, dan integrasi dengan program nasional seperti UPBS (Unit Pengelola Benih Sumber) atau Toko Tani Indonesia Center (TTIC).

Dengan penguatan unit pembibitan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan diharapkan mampu mendorong peningkatan produktivitas pertanian daerah, mengurangi ketergantungan benih luar, serta mempercepat transformasi sistem pertanian berbasis inovasi dan kemandirian lokal.

#### **4. Transformasi Balai Benih Ikan (BBI) menjadi Balai Budidaya Air Tawar (BBAT)**

Dalam rangka mendukung pengembangan subsektor perikanan budidaya secara lebih luas dan terpadu, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan melakukan transformasi kelembagaan terhadap Balai Benih Ikan (BBI) menjadi Balai Budidaya Air Tawar (BBAT). Perubahan ini dilakukan sebagai respons atas meningkatnya kebutuhan layanan publik yang tidak hanya terbatas pada penyediaan benih ikan, tetapi juga mencakup kegiatan budidaya ikan secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir.

Perubahan fungsi ini memperluas mandat unit teknis dari sekadar pusat produksi dan distribusi benih menjadi pusat pengembangan budidaya air tawar, mencakup pembenihan, pendederan, pembesaran, edukasi teknis, dan pemberdayaan masyarakat. Balai Budidaya Air Tawar (BBAT) kini menjadi infrastruktur strategis daerah yang tidak hanya mendukung peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan rakyat, tetapi juga memainkan peran penting dalam penanganan stunting melalui peningkatan akses terhadap sumber protein hewani yang bergizi dan terjangkau.

Hal ini menjadi sangat relevan mengingat Angka Konsumsi Ikan (AKI) di Kota Balikpapan pada tahun 2024 hanya mencapai 40,73 kg/kapita, masih jauh di bawah target nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 62,05 kg/kapita. Rendahnya konsumsi ikan ini menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam pemenuhan gizi masyarakat, terutama pada keluarga berisiko stunting. Dengan peran BBAT dalam memperluas akses terhadap ikan konsumsi dan edukasi budidaya ikan air tawar di tingkat rumah tangga, diharapkan dapat mendorong peningkatan konsumsi ikan sekaligus mempercepat penurunan angka stunting di Kota Balikpapan.

Perubahan fungsi ini juga memungkinkan BBAT untuk menjadi sarana diseminasi teknologi budidaya ikan efisien seperti sistem bioflok dan kolam terpal.

Namun demikian, BBAT masih menghadapi tantangan struktural dan operasional, antara lain keterbatasan luas lahan dan infrastruktur fisik, fluktuasi permintaan benih dan ikan konsumsi, serta belum terpenuhinya standar Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) sebagai jaminan mutu. Untuk menjawab tantangan tersebut, kebijakan pengembangan ke depan diarahkan pada:

- Peningkatan kapasitas produksi benih dan ikan konsumsi melalui pendekatan teknologi padat tebar;
- Diversifikasi komoditas unggulan lokal yang bernilai ekonomi tinggi dan adaptif;
- Integrasi dengan program pemberdayaan masyarakat, baik di wilayah pesisir maupun perkotaan, melalui pendampingan usaha dan pembentukan kelompok budidaya ikan.

Lebih dari sekadar unit pelaksana teknis, BBAT kini juga diposisikan sebagai pilar ekonomi lokal yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan pendekatan manajemen berbasis kewirausahaan publik.

Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kelembagaan dan pengelolaan BBAT yang mencakup:

- Peningkatan kapasitas manajerial dan tata kelola layanan publik;
- Revitalisasi infrastruktur dan peralatan produksi budidaya;
- Pembentukan skema kemitraan usaha bersama pelaku swasta, koperasi nelayan, dalam rangka membangun ekosistem budidaya yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan transformasi yang telah dilakukan, BBAT diharapkan menjadi motor penggerak pengembangan perikanan budidaya yang produktif, kompetitif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Kota Balikpapan dalam agenda pembangunan pangan dan ekonomi kerakyatan tahun 2025–2029.

#### **D. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Selama periode 2021-2024, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan menunjukkan kinerja pelayanan yang cukup progresif, tercermin dari peningkatan capaian pada indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) dalam tiga urusan utama yaitu Urusan Pangan, Urusan Pertanian dan Urusan Perikanan. Adapun Realisasi capaian kinerja DKP3 Kota Balikpapan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah	10	7,9	88%	12	2	20%	14	13,09	109,08%
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam dan Aman	Tingkat Konsumsi Energi/TKE (AKE 2100 Kkal/kap/hari)	94,5	95	101%	94,5	94,9	100%	94,5	94,5	100%
		Tingkat Konsumsi Protein/TKP (57 Gram/kap/hari)	100	115	115%	100	116	116%	100	114	114%
		Persentase Keamanan Pangan	88	100	114%	89	100	112%	89	100	112,36%
3	Meningkatnya Produksi Sumber Daya Pangan	Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan	17.800	14.081	80%	18.000	16.956	95%	18.000	21.832,30	121,29%
		Total Produksi Sub Sektor Tanaman Hortikultura	120.500	187.540	156%	126.600	185.175	146%	133.000	146.788,60	110,37%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		Total Produksi Sub Sektor Tanaman Perkebunan	9.886	16.087	163%	10.193	16.568,21	163%	10.501	15.274,22	145,45%
		Total Produksi Sub Sektor Peternakan	20.500	17.714	86%	20.600	17.094,79	83%	20.700	24.199,17	116,90%
		Total Produksi Sub Sektor Perikanan	4.489	4.800	107%	4.597	4.660,17	101%	4.704	4.182,75	88,92%
4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	81	80,08	99%	81,2	80,08	99%	81,5	81,03	99,42%

Sumber Data : Hasil Olah data Tim Kerja Program, Januari 2025



Selama periode pelaksanaan Renstra Tahun 2021–2024, DKP3 Kota Balikpapan telah menunjukkan capaian kinerja yang beragam pada masing-masing sasaran strategis. Secara umum, pencapaian indikator menunjukkan tren yang positif dengan beberapa catatan perbaikan yang perlu ditindaklanjuti pada periode perencanaan selanjutnya.

Berdasarkan data pada Tabel 3, Capaian sasaran strategis Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah menunjukkan tren yang fluktuatif selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, capaian berada di angka 88% dari target. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan drastis menjadi hanya 20% akibat belum terbitnya Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Kondisi ini membaik signifikan pada tahun 2024, di mana capaian berhasil melampaui target sebesar 109,08%. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan, termasuk penyempurnaan regulasi dan mekanisme pengadaan yang lebih responsif.

Indikator tingkat konsumsi energi dan protein menunjukkan capaian yang stabil dan konsisten berada di atas target nasional. Konsumsi energi tercatat stabil pada angka 94,5 kkal/kapita/hari dari tahun 2022 hingga 2024, setara dengan 100% target. Konsumsi protein berada di atas target selama tiga tahun, meskipun mengalami sedikit penurunan dari 115% pada 2022 menjadi 114% pada 2024. Capaian ini mencerminkan keberhasilan intervensi seperti edukasi gizi, promosi pangan lokal, dan program percepatan penurunan stunting. Meski demikian, stagnasi capaian menunjukkan perlunya inovasi dan diversifikasi strategi untuk mendorong peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

Indikator keamanan pangan menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian konsisten di atas 112% selama tiga tahun terakhir. Pada aspek produksi, lima subsektor utama menunjukkan tren yang umumnya positif, dengan pencapaian tertinggi pada subsektor hortikultura yang mencapai 156% pada tahun 2022. Produksi tanaman pangan juga mengalami peningkatan signifikan, dari 80% pada 2022 menjadi 121,29% pada 2024. Sub sektor peternakan menunjukkan pemulihan dari 83% pada 2023 menjadi 116,9% pada 2024. Sementara itu, subsektor perikanan justru mengalami penurunan dari capaian 107% pada 2022 menjadi 88,92% pada 2024.

Peningkatan kinerja pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan mencerminkan adanya penguatan dukungan sarana produksi, peningkatan kapasitas petani melalui penyuluhan, serta sinergi program antara pemerintah pusat dan daerah. Sebaliknya, menurunnya produksi perikanan diduga terkait dengan tantangan eksternal seperti degradasi lingkungan, keterbatasan alat tangkap, serta menurunnya daya dukung wilayah

pesisir yang belum diimbangi dengan intervensi teknologi atau pengelolaan sumber daya yang memadai.

Capaian nilai SAKIP Dinas menunjukkan tren stabil selama tiga tahun terakhir dengan rata-rata capaian mendekati 99% dari target tahunan. Konsistensi ini mencerminkan bahwa penerapan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi telah berjalan sesuai mekanisme. Namun, belum adanya peningkatan signifikan pada nilai SAKIP menunjukkan perlunya reformasi lanjutan, khususnya melalui penguatan inovasi layanan publik, percepatan digitalisasi, serta perbaikan sistem evaluasi dan akuntabilitas internal.

#### **E. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan memiliki cakupan pelayanan yang luas, mencakup seluruh sektor strategis dalam urusan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, DKP3 menasar berbagai kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat langsung atas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Identifikasi kelompok sasaran ini menjadi pijakan penting dalam penyusunan strategi pelayanan publik yang inklusif dan berdampak. Kelompok sasaran pelayanan DKP3 mencakup:

1. Petani dan Peternak, sebagai pelaku utama dalam produksi pangan dan sumber daya pertanian, merupakan target intervensi peningkatan produktivitas, dukungan sarana dan prasarana, serta penguatan kelembagaan dan pembiayaan.
2. Pembudidaya Ikan dan Nelayan, sebagai kelompok penggerak subsektor perikanan budidaya dan tangkap, menjadi sasaran program pembinaan teknis, bantuan sarana produksi, serta fasilitasi pemasaran dan diversifikasi usaha.
3. Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Pangan, termasuk UMKM pangan, koperasi tani/nelayan, serta pengolah hasil perikanan, hortikultura, dan peternakan, difasilitasi dalam bentuk bantuan sarana pengolahan, promosi produk, sertifikasi keamanan pangan, dan pelatihan.
4. Keluarga Rentan dan Masyarakat Berpendapatan Rendah, sebagai kelompok prioritas dalam pemenuhan akses pangan, menjadi sasaran program pengendalian inflasi pangan, distribusi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), serta intervensi percepatan penurunan stunting berbasis pangan lokal.
5. Kelompok Tani, Kelompok Ternak, dan Kelompok Perikanan, yang menjadi wadah partisipatif dalam pelaksanaan program, turut diperkuat melalui fasilitasi legalitas kelembagaan, pelatihan, dan penguatan peran dalam pembangunan sektoral.
6. Lembaga Pendidikan, Penyuluh, dan Masyarakat Umum, yang berperan dalam transformasi perilaku konsumsi, edukasi pangan bergizi seimbang, dan advokasi ketahanan pangan berbasis komunitas.
7. Kelompok Masyarakat Pemilik dan Pecinta Hewan Kesayangan, seperti pemilik anjing, kucing, dan hewan peliharaan lainnya, merupakan kelompok sasaran dalam pelayanan kesehatan hewan, vaksinasi rabies, edukasi pemeliharaan yang bertanggung jawab, serta pengawasan lalu lintas hewan. Kelompok ini turut menjadi mitra dalam upaya menjaga

kesehatan masyarakat veteriner serta pencegahan zoonosis di wilayah perkotaan.

Pelayanan terhadap seluruh kelompok sasaran ini dirancang untuk mendorong peningkatan daya saing, ketahanan pangan daerah, serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. DKP3 berkomitmen untuk terus mengembangkan pendekatan berbasis data, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi pelayanan publik dalam menjangkau kelompok sasaran secara lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

#### **F. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan**

Pelayanan publik di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan memerlukan kolaborasi multipihak yang kuat, terpadu, dan berkelanjutan. DKP3 Kota Balikpapan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, maupun institusi vertikal. Sinergi ini menjadi kunci utama dalam mendukung efektivitas pelayanan, akselerasi program, serta pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun mitra pelayanan DKP3 Kota Balikpapan meliputi:

1. Perangkat Daerah Terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, DP3AKB, serta Bappeda-Litbang, yang mendukung pelaksanaan program lintas sektor seperti penanganan stunting, pengendalian inflasi dan kemiskinan, serta penguatan sistem distribusi pangan.
2. Instansi Vertikal dan Pemerintah Pusat, termasuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang memberikan dukungan regulasi, pembinaan teknis, fasilitasi koordinasi lintas daerah, serta perumusan kebijakan strategis pangan nasional yang menjadi acuan daerah.
3. TNI dan Polri, sebagai mitra pengamanan dan pendampingan program strategis ketahanan pangan, baik melalui dukungan distribusi pangan, pengawalan kegiatan lapangan, pengamanan stok pangan, maupun keterlibatan dalam kegiatan sosial pangan seperti gelar pangan murah, penyaluran bantuan pangan, dan pemanfaatan lahan tidur untuk budidaya.
4. Badan Pusat Statistik (BPS) dan BMKG, yang menjadi penyedia data statistik, informasi iklim dan cuaca pertanian, serta sumber informasi untuk analisis kerawanan pangan dan perencanaan program berbasis data.
5. Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi, seperti KTNA, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), asosiasi peternak dan nelayan, serta komunitas pemilik dan pecinta hewan kesayangan, yang mendukung pelaksanaan edukasi, pengawasan lapangan, kegiatan sosialisasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan dan kesehatan hewan. Salah satu mitra penting dalam hal ini adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Balikpapan, yang berperan aktif dalam pelayanan vaksinasi dan pengobatan hewan. PDHI menjadi mitra teknis dalam pelaksanaan program kesehatan hewan, seperti vaksinasi rabies, pemeriksaan rutin, dan edukasi masyarakat terkait zoonosis dan kesejahteraan hewan, yang merupakan bagian dari upaya DKP3 dalam menguatkan kesehatan masyarakat veteriner.

6. Pelaku Usaha dan Dunia Industri, meliputi UMKM, koperasi, distributor, pengolah, hingga ritel pangan, yang menjadi bagian penting dalam rantai nilai pangan dari produksi hingga pemasaran. Dalam konteks stabilisasi harga dan pengendalian inflasi, DKP3 menjalin kerja sama dengan Perum BULOG dan Bank Indonesia. Perum BULOG berperan dalam penyediaan komoditas pangan pokok dengan harga terjangkau melalui kegiatan Gelar Pangan Murah (GPM), sedangkan Bank Indonesia melalui perannya dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memberikan dukungan dalam koordinasi program, penyediaan data analisis, serta fasilitasi kegiatan pengendalian inflasi berbasis komoditas pangan strategis. Kolaborasi ini terbukti efektif dalam menjaga keterjangkauan harga pangan serta daya beli masyarakat.
7. Kelurahan, RT/RW, dan Lembaga Kemasyarakatan, yang berperan dalam identifikasi kelompok sasaran, pendataan masyarakat rentan, fasilitasi distribusi pangan, serta pelaksanaan program berbasis komunitas.
8. Media dan Platform Digital, sebagai mitra komunikasi publik dalam penyebaran informasi edukatif, promosi pangan lokal, peringatan dini harga pangan, serta penguatan partisipasi masyarakat terhadap program-program DKP3.

Dengan keterlibatan aktif para mitra tersebut, DKP3 Kota Balikpapan dapat memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di sektor pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan berjalan secara lebih efektif, inklusif, kolaboratif, dan berkeadilan, serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **A. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan gizi masyarakat yang bersumber dari pangan, pertanian, dan hasil perikanan. Isu kecukupan gizi saat ini menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya membangun Sumber Daya Manusia yang cerdas, tangguh, sehat, dan berprestasi. Data kasus kesehatan di Indonesia, termasuk di Kota Balikpapan, mengungkapkan berbagai persoalan seperti obesitas, penyakit metabolisme, serta kasus stunting yang menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah.

Kota Balikpapan sendiri memiliki potensi sumber daya yang sangat besar di sektor ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan. Namun, pengembangan sektor ini, khususnya dalam mewujudkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan dan bergizi, menghadapi tantangan yang kompleks dan saling terkait mulai dari aspek produksi, distribusi, pengolahan, hingga konsumsi.

Pelayanan publik pada urusan pangan, pertanian, dan perikanan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Balikpapan masih menghadapi sejumlah permasalahan krusial yang berdampak pada efektivitas dan jangkauan layanan kepada masyarakat. Permasalahan tersebut mencerminkan tantangan struktural, teknis, dan sosial yang memerlukan penanganan lintas sektor secara sistematis dan berkelanjutan. Beberapa permasalahan utama yang telah diidentifikasi antara lain:

1. Ketergantungan Pasokan Pangan dari Luar Daerah

Kota Balikpapan sangat bergantung pada pasokan pangan pokok dari daerah lain, disebabkan oleh terbatasnya lahan pertanian, minimnya hasil produksi lokal, dan tidak meratanya infrastruktur penyimpanan dan distribusi pangan (seperti gudang dan cold storage). Ketergantungan ini meningkatkan risiko kerentanan distribusi dan gejolak harga pangan, terutama menjelang hari besar keagamaan atau saat terjadi gangguan pasokan.

#### 2. Masih Tingginya Tingkat Inflasi Daerah

Harga pangan di Balikpapan cenderung tinggi dibandingkan kota lain. Masyarakat berpenghasilan rendah sangat terdampak oleh fluktuasi harga dan belum sepenuhnya tersentuh oleh skema jaring pengaman pangan.

#### 3. Belum Optimalnya Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Balikpapan masih rendah. Hal ini disebabkan oleh konsumsi yang belum beragam dan seimbang, terutama rendahnya konsumsi sayur dan buah. Harga pangan non-karbohidrat yang relatif mahal, ditambah belum adanya regulasi dan kampanye gizi terpadu seperti B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman), turut memperparah kondisi ini.

#### 4. Pengawasan Keamanan Pangan Segar yang Belum Maksimal

Keterbatasan jumlah dan kualitas SDM pengawas pangan segar mengingat beragamnya jenis pangan segar asal tumbuhan dan luasnya cakupan pengawasan pangan segar asal tumbuhan dan pelaku usaha belum memahami pentingnya pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan yang ditanganinya.

#### 5. Produktivitas Pertanian dan Peternakan yang Rendah

Produktivitas lahan pertanian masih rendah akibat alih fungsi lahan, kesuburan tanah yang kurang, terbatasnya sarana produksi, serta kurang optimalnya penerapan teknologi pertanian. Di sisi peternakan, produksi daging masih sangat tergantung dari luar daerah (98% sapi bakalan berasal dari luar Kalimantan), dan kesadaran peternak terhadap sistem pemeliharaan yang berkelanjutan masih rendah.

#### 6. Kurangnya Regenerasi dan Kompetensi SDM Pertanian dan Perikanan

Tingkat pendidikan petani dan nelayan relatif rendah, minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian/perikanan juga minim. Hal ini berdampak pada rendahnya adopsi teknologi dan inovasi, serta lemahnya kelembagaan kelompok tani dan nelayan dalam mengakses bantuan atau permodalan.

#### 7. Keterbatasan Fasilitas dan Layanan Kesehatan Hewan

Gedung Rumah Potong Hewan (RPH) di Kota Balikpapan belum memenuhi standar Nomor Kontrol Veteriner (NKV), kekurangan tenaga medik dan paramedik veteriner, serta keterbatasan peralatan pengujian cemaran mikroba. Selain itu, belum semua pelaku usaha memiliki izin usaha dan memahami prinsip ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal).

#### 8. Ancaman Penyakit Hewan Menular dan Lalu Lintas Ternak

Sebagai pintu masuk ternak ke Kalimantan Timur, Kota Balikpapan berisiko tinggi terhadap penyebaran penyakit hewan menular strategis. Belum optimalnya pengawasan lalu lintas ternak dan edukasi kepada masyarakat memperbesar potensi penularan ke ternak lokal.

#### 9. Produksi dan Budidaya Perikanan yang Belum Optimal

Produksi perikanan masih rendah akibat keterbatasan sarana produksi, terbatasnya lahan budidaya, rendahnya pemanfaatan teknologi, serta minimnya pelatihan teknis dan pembinaan kepada pelaku usaha. Akses terhadap permodalan dan informasi program bantuan pemerintah juga masih menjadi kendala utama.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi pondasi dalam merumuskan strategi pelayanan DKP3 ke depan. Upaya perbaikan harus diarahkan pada penguatan kelembagaan dan SDM, optimalisasi pemanfaatan teknologi, peningkatan kolaborasi lintas sektor, dan penyediaan infrastruktur pendukung yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Hasil identifikasi permasalahan pembangunan pangan, pertanian dan perikanan Kota Balikpapan, sebagai berikut:

Tabel 4. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Urusan Pangan, Pertanian dan Perikanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab masalah /Akar Masalah
1	<b>URUSAN PANGAN</b>		
	Penyediaan pangan pokok atau pangan lainnya sangat tergantung dari daerah lain	Minimnya hasil produksi pertanian, Keterbatasan infrastruktur dan pasokan pangan yang tidak merata, tidak tersedianya fasilitas penyimpanan	Dukungan Infrastruktur pangan sesuai jenis-jenis pangan pokok atau pangan lainnya belum tersedia (gudang pangan, cold storage untuk produk pertanian misal cabai, bawang merah, bawang putih, dan lain-lain)
	Tingkat inflasi yang cukup tinggi Kota Balikpapan	Ketergantungan pasokan dari luar daerah	Ketergantungan pasokan dari luar daerah, minimnya lokasi pertanian serta alih fungsi lahan, cuaca sangat rentan terhadap distribusi pangan adanya peningkatan menjelang hari-hari besar keagamaan dan keterbatasan sarana inffrastruktur seperti pergudangan dan sarana penyimpanan, Belum adanya kerjasama daerah yang konkret baik dari antar perusda dengan daerah pemasok pangan di Kota Balikpapan
	Masih Terdapatnya Masyarakat Rentan yang masih belum mampu memenuhi kebutuhan pangannya di Kota Balikpapan	Tingginya harga pangan di Kota BALikpapan , belum adanya jaringan pengaman sosial kepada masyarakat rentan	Lapangan pekerjaan yang tersedia belum mencukupi untuk menampung keseluruhan masyarakat, adanya imbas IKN sebagai magnet urbanisasi penduduk ke Kota BALikpapan, Belum memiliki program strategis untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat rentan, belum adanya intervensi secara langsung penyebab dari daerah ayng rentan pangan

	Masih minimnya Skor Pola Pangan Harapan di Kota Balikpapan	Pola Konsumsi masyarakat yang belum beragam, seimbang dan aman	tingginya harga pangan sayuran dan buah melebihi harga pangan karbohidrat, belum adanya regulasi terkait B2SA
	Masih ditemukannya pangan segar asal tumbuhan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Keterbatasan jumlah dan kualitas SDM pengawas pangan segar mengingat beragamnya jenis pangan segar asal tumbuhan dan luasnya cakupan pengawasan pangan segar asal tumbuhan
			Pelaku usaha belum memahami pentingnya pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan yang ditanganinya
	Ketersediaan pangan dalam mendukung ketahanan kota belum stabil dan berkelanjutan	Penambahan penduduk di Kota Balikpapan yang mempengaruhi ketergantungan terhadap ketersediaan pangan	Ketergantungan terhadap kestabilan dan keberlanjutan ketersediaan pangan kota sebagai dampak dr IKN berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian. kesehatan dan kesejahteraan masyarakat kota secara keseluruhan
2	<b>URUSAN PERTANIAN</b>		
	Pemanfaatan sarana prasarana dan penerapan teknologi pertanian tepat guna belum optimal.	Terbatasnya kemampuan petani dalam penyediaan sarana prasarana pertanian (alat, bibit unggul, dsb) dan tingginya biaya operasional	Keterbatasan akses permodalan melalui lembaga keuangan untuk penyediaan sarana , prasarana dan biaya operasional bagi petani
			Keterbatasan akses informasi tentang adanya program bantuan pemerintah untuk penyediaan sarana dan prasarana di sektor pertanian
		Kualitas dan kemampuan SDM petani belum optimal	Tingkat pendidikan petani secara umum relatif rendah sehingga pengetahuan dan kemampuan petani dalam menerapkan teknologi tepat guna; fasilitas pertanian (alat, bibit unggul, dsb.) yang ada belum optimal
			Kurangnya regenerasi SDM petani karena generasi muda tidak tertarik dengan pertanian
	Terbatasnya lahan pertanian	Alih fungsi lahan pertanian menjadi area non-pertanian (permukiman, industri, dll) mengurangi luas lahan tanam dan produksi lokal	Pertumbuhan kawasan permukiman dan infrastruktur mengurangi luas lahan budidaya; urbanisasi yang tinggi meningkatkan permintaan lahan non-pertanian,

		Produktifitas lahan untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih rendah	Tanah tidak subur (jenis podzolic merah kuning/lempung)
	Ketersediaan Sapi Bakalan di Bakalan menurun	Tingginya Ketergantungan Peternak Balikpapan untuk penyediaan Sapi Bakalan terhadap Daerah Luar (98% dari Sulawesi, NTB, NTT dan Jawa)	Peminatan peternak terhadap sistem beternak pengembangan dengan memelihara sapi betina sangat rendah
	Ketersediaan lahan untuk peternakan menurun	Keterbatasan lahan peternakan di Kota Balikpapan akibat alih fungsi lahan perkotaan	Pertumbuhan kawasan pemukiman dan infrastruktur mengurangi luas lahan budidaya peternakan, Pertambahan penduduk akibat penetapan IKN meningkatkan permintaan lahan non pertanian menyebabkan produksi peternakan berpotensi mengalami penurunan
	Penjaminan Keamanan Pangan asal hewan di Kota Balikpapan masih perlu ditingkatkan	Keamanan Pangan asal hewan di Kota Balikpapan perlu ditingkatkan di seluruh jalur distribusi	Masih ditemukannya bahan pangan segar asal hewan yang tidak memenuhi syarat keamanan pangan ,belum memiliki laboratorium uji cemaran mikroba dan kekurangan SDM Penguji
			masih adanya pelaku usaha yang belum memiliki Nomor kontrol Veteriner sebagai jaminan hygiene sanitasi produk asal hewan
		Kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi produk asal hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH) masih kurang	Edukasi dan sosialisasi mengenai produk ASUH belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat
	Resiko kejadian penyakit hewan menular strategis di Kota Balikpapan meningkat	Kota Balikpapan merupakan pintu masuk lalu lintas hewan ke propinsi Kalimantan Timur sehingga resiko masuknya penyakit hewan menular menjadi relatif tinggi	Lalulintas ternak dari berbagai wilayah dan Propinsi/Pulau ke kotra Balikpapan meningkatkan peluang penularan penyakit hewan ke ternak lokal dan manusia
		Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan hewan masih kurang	Edukasi dan sosialisasi mengenai kesehatan hewan dan pencegahan penyakit hewan menular belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat



	Pelaku Usaha Aktivitas Kesehatan Hewan dan Peternakan yang memiliki Izin Usaha masih sedikit/belum ada	Pemahaman ketaatan terhadap perijinan berusaha di tingkat pelaku usaha peternakan dan kesehatan hewan masih kurang	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait perijinan berusaha sektor Peternakan dan akitivitas kesehatan hewan belum menjangkau kepada seluruh pemilik usaha sektor peternakan dan kesehatan hewan
	UPTD RPH saat ini belum mempunyai NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Kondisi bangunan dan sarana prasarana gedung pemotongan hewan belum memenuhi persyaratan NKV	Kondisi bangunan gedung pemotongan hewan dan sarana prasaranya yang perlu rehabilitasi dan pemeliharaan
		SDM yang belum memenuhi kuantitas dan kualitas	kurangnya tenaga medik dan paramedik veteriner di UPTD RPH
	Mutu Intensifikasi dan Diversifikasi Pertanian Rendah	Belum optimalnya pembinaan / Latihan dan Kunjungan PPL ke Poktan, KWT dan GAPOKTAN karena Penyuluh Pertanian Lapangan kurang memadai	sarpras belum memadai
			SDM Penyuluh masih kurang
			Pemupukan belum berimbang
			pengendalian OPT belum optimal
			Kondisi iklim tidak menentu
3	URUSAN PERIKANAN		
	Kurang optimalnya produksi perikanan	kurang memadainya prasarana dan sarana produksi perikanan	Sarana produksi (nelayan, budidaya dan pengolahan) masih minim, tidak memadai dan masih bersifat tradisional
			Kurangnya ketersediaan pakan dan pupuk
			Minimnya pemanfaatan teknologi usaha perikanan dan pengolahan hasil perikanan
			Terbatasnya lahan budidaya perikanan
		Kelembagaan dan permodalan yang masih minim	Terbatasnya akses permodalan pelaku usaha perikanan
			Keterbatasan kelembagaan pelaku usaha periknan untuk menjangkau program bantuan.
		Kualitas dan Kemampuan SDM Pelaku usaha perikanan belum optimal	Masih rendahnya pengetahuan dan teknologi terkait penangkapan, pembudidayaan ikan dan pengolahan hasil perikanan

**B. Isu Strategis**

Identifikasi isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan strategis yang dinamis, meliputi isu global, nasional, dan regional yang berpengaruh terhadap pembangunan ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses identifikasi ini mengacu pada berbagai dokumen perencanaan dan regulasi, antara lain dokumen RPJMN 2025–2029,

Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Balikpapan, RPJMD Kota Balikpapan 2025–2029, Penjaringan aspirasi dan masukan dari stakeholder terkait, seperti kelompok tani, nelayan, pelaku usaha pangan, penyuluh, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat.

Selain itu, identifikasi isu strategis juga memperhatikan tantangan yang muncul akibat perubahan iklim, perkembangan teknologi, dinamika pasar pangan, serta kebutuhan peningkatan kapasitas SDM di sektor ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan.

Berdasarkan hasil pengkajian terhadap dokumen perencanaan, data lapangan, dan masukan pemangku kepentingan, isu strategis yang dihadapi DKP3 Kota Balikpapan dapat dirumuskan dan disajikan dalam tabel identifikasi isu strategis berikut :

Tabel. 5. Identifikasi Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan

Potensi yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Wilayah dataran rendah di Kota Balikpapan memiliki karakteristik agroklimat yang mendukung pengembangan tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah musiman	Luas lahan produktif terus mengalami penyusutan akibat alih fungsi lahan untuk kebutuhan permukiman dan infrastruktur.	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Perubahan iklim dan dampaknya terhadap produksi dan distribusi pangan	Alih Fungsi dan Penurunan Kualitas Lahan Pertanian	Keterbatasan Lahan Pertanian Akibat Urbanisasi dan Alih Fungsi	Masih rendahnya produktivitas Pertanian dan Perikanan
Masih banyak lahan pekarangan masyarakat yang belum digunakan secara produktif. Potensi ini dapat dikembangkan melalui program pemanfaatan pekarangan seperti Budikdamber (budidaya ikan dalam ember), hidroponik, dan peternakan ayam skala rumah tangga sebagai bentuk urban farming yang memperkuat ketahanan pangan rumah tangga.	Masih rendahnya pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan rumah tangga		Risiko ekologis di pesisir dan laut terhadap perikanan	Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut	Tekanan Daya Dukung Pangan dan Air	
Tersedia lahan potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk budidaya ikan air tawar seperti lele, nila, dan patin.	Belum optimalnya pemanfaatan lahan potensial untuk budidaya perikanan		Kebutuhan adaptasi dan pengembangan pertanian serta perikanan	Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim	Perubahan Iklim dan Ancaman Ketidakpastian Musim	

Potensi yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
			berketahanan iklim			
Hutan kemasyarakatan yang ada di sekitar wilayah penyangga dapat menjadi basis peningkatan produksi pertanian terpadu dan perikanan budidaya yang ramah lingkungan, melalui pendekatan agroforestry dan kolam bioflok.	Hutan kemasyarakatan belum secara optimal dimanfaatkan untuk produksi pangan			Tingginya Emisi dari Kegiatan Pertanian dan Peternakan	Tekanan Daya Dukung Pangan dan Air	
Potensi komoditas pertanian lokal perlu diarahkan ke hilirisasi melalui pengolahan hasil (misal: abon ikan, sambal ikan asap, keripik pisang lokal) untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan peluang usaha baru.	Rendahnya nilai tambah produk hasil pertanian			Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah Organik dan Limbah Pertanian/Perikanan	Perubahan Iklim dan Ancaman Ketidakpastian Musim	
Tersedianya tim brigade alsintan dapat mempercepat proses tanam dan panen serta efisiensi lahan pertanian yang masih	Pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) belum merata			Penyakit Hewan Menular Strategis dan Keamanan Pangan Hewani		

Potensi yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
aktif, sehingga mendukung peningkatan produktivitas secara teknis dan ekonomis.						
Jumlah pelaku usaha pangan di Kota Balikpapan cukup besar, namun belum semuanya terintegrasi dalam program pemberdayaan OPD.	Tingginya jumlah pelaku usaha pangan belum dibarengi dengan intervensi program yang masif, khususnya dalam hal perizinan, peningkatan kapasitas, dan akses modal, sehingga potensi ekonomi pangan belum termanfaatkan secara maksimal					
Masih banyak pelaku usaha di sektor peternakan dan pangan yang belum memiliki izin usaha karena belum adanya kesadaran akan pentingnya legalitas, disertai hambatan dalam proses perizinan seperti minimnya akses informasi dan pendampingan.						

Potensi yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pelaku usaha ternak skala kecil	Jumlah pelaku usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang telah memiliki izin usaha tercatat masih sangat terbatas.					
Aktivitas peternakan rumah tangga	Risiko kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) meningkat akibat lemahnya sistem pengawasan dan belum optimalnya program pencegahan dan respon cepat terhadap potensi wabah penyakit ternak.					
Gudang pangan dan sistem distribusi lokal yang dapat dimaksimalkan untuk stabilisasi pasokan	Pola Konsumsi Gizi Tidak Seimbang	Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan		Ketimpangan Distribusi dan Aksesibilitas Pangan	Ketergantungan Pasokan Pangan dari Luar Daerah	Ketersediaan Pangan yang masih tergantung dari daerah lain
Kerjasama antar daerah, penguatan jejaring distribusi pangan lokal, dan pengembangan Pasar Mitra Tani.	Ketersediaan Bahan Pangan sangat tergantung dari daerah lain sehingga mempengaruhi Harga Pangan yang Tidak Stabil				Kenaikan Jumlah Penduduk akibat Proyeksi Perpindahan ke Wilayah IKN	

**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**3.1 Tujuan**

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Balikpapan merumuskan satu tujuan strategis yang menjadi landasan pembangunan sektor pangan, pertanian, dan perikanan selama lima tahun ke depan. Tujuan ini mencakup upaya peningkatan ketahanan pangan, penguatan sektor pertanian dan perikanan, peningkatan pendapatan pelaku usaha, serta optimalisasi produksi komoditas unggulan daerah.

Mempertimbangkan kondisi eksisting Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Balikpapan, baik dari aspek sumber daya, kewenangan, maupun isu strategis yang dihadapi, maka dalam penyusunan Rencana Strategis 2025–2029 ditetapkan satu tujuan utama yang berfungsi sebagai arah pembangunan sektor pangan, pertanian, dan perikanan selama lima tahun ke depan. Penetapan tujuan tunggal ini diharapkan mampu memberikan fokus, konsistensi, dan kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja perangkat daerah. Adapun tujuan yang ditetapkan adalah:

**“Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Balikpapan”**

Tujuan ini mencerminkan komitmen DKP3 Kota Balikpapan untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, distribusi, dan konsumsi pangan yang aman, bergizi, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam jangka waktu lima tahun (2025–2029), pencapaian tujuan ini dapat diukur melalui penurunan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PKKP) atau Prevalence of Undernourishment (PoU), berkurangnya tingkat kerentanan pangan rumah tangga, meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap perekonomian daerah, serta bertambahnya pendapatan pelaku usaha di bidang pangan, pertanian, dan perikanan.

Dengan perumusan tujuan ini, DKP3 menempatkan peningkatan ketahanan pangan bukan hanya sebagai upaya penyediaan bahan pangan, tetapi juga sebagai fondasi utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing sektor pertanian dan perikanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

Tujuan ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan strategis, yaitu:

1. RPJMN 2025–2029, yang menetapkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas nasional.
2. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025–2029, yang menekankan penguatan sektor pangan guna mendukung pembangunan daerah.
3. RPJMD Kota Balikpapan 2025–2029, yang memuat sasaran peningkatan Indeks Ketahanan Pangan sebagai bagian dari Misi pembangunan kota.
4. Visi dan Misi Wali Kota Balikpapan, yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui akses pangan yang cukup, aman, dan bergizi.

Tabel 6. Keselarasan Target Tujuan Renstra DKP3 dengan Tujuan RPJMD Kota Balikpapan, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJMN Tahun 2025-2029

INDIKATOR	Target DKP3		Target RPJMD Kota Balikpapan		Target RPJMD Provinsi Kaltim		Target RPJMN	
	2025	2029	2025	2029	2025	2029	2025	2029
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PKKP)/Prevalency of Undernourishment (PoU)	5,67	4,59	5,67	4,59	6,80	4,21	7,21	4,41

Penetapan tujuan ini didasarkan pada dua landasan utama:

1. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan, khususnya di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan, sebagai acuan penyusunan kebijakan dan program daerah agar selaras dengan kebijakan nasional.
2. Sasaran RPJMD Kota Balikpapan 2025–2029, yang memuat prioritas pembangunan daerah dan target kinerja sektoral yang harus dicapai selama lima tahun.

Selaras dengan kebijakan nasional dan sasaran RPJMD Kota Balikpapan, tujuan ini difokuskan pada tiga arah pengembangan utama:

1. Ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan berkelanjutan, melalui peningkatan produksi komoditas unggulan, efisiensi rantai pasok, dan penguatan cadangan pangan daerah.
2. Peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan, melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan perluasan akses pasar.
3. Peningkatan konsumsi pangan bergizi dan seimbang, melalui edukasi, diversifikasi pangan lokal, dan promosi pola makan sehat.

Tujuan ini mengintegrasikan dua aspek utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan, pertanian, dan perikanan sebagai penopang ketersediaan pangan yang aman, bergizi, dan berkelanjutan.
2. Peningkatan pendapatan petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan melalui penguatan kelembagaan, efisiensi usaha, inovasi teknologi, dan perluasan akses pasar.

Dengan penetapan tujuan ini, diharapkan sektor ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan mampu berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 3.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan strategis DKP3 Kota Balikpapan, yaitu capaian yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu untuk mendukung pembangunan ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan di daerah. Sasaran menjadi bagian integral dari proses perencanaan strategis, dengan fokus pada langkah nyata dan pengalokasian sumber daya untuk mendukung program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas. Sasaran dirumuskan secara spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga kemajuannya dapat dinilai secara jelas dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Sasaran strategis yang hendak dicapai dalam periode Renstra 2025–2029 antara lain:

1. Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau.



2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tabel 7. Perumusan Tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terpenuhinya Kebutuhan Pangan yang Berkualitas			Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	nilai komposit yang menggambarkan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan	Berdasarkan Perhitungan BPS	91,23						
	Meningkatnya Ketahanan Pangan		Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PKKP)/Prevalency of Undernourishment (PoU)	Proporsi penduduk yang konsumsi energi rata-rata per hari-nya berada di bawah ambang batas kebutuhan energi minimum yang diperlukan untuk menjalani hidup sehat dan aktif.		5,9	5,9	5,90	5,10	4,30	3,50	2,70
		SASARAN 1 : Meningkatkan Ketersediaan dan Pemanfaatan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka yang menunjukkan keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat berdasarkan kontribusi energi 9 kelompok pangan terhadap total konsumsi energi harian		87,35	87,35	87,66	87,98	88,29	88,60	88,91
		SASARAN 2 : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Ukuran tingkat penerapan sistem akuntabilitas kinerja oleh perangkat daerah, yang mencerminkan sejauh mana instansi mampu mempertanggungjawabkan hasil (outcome) atas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara efisien dan efektif.		81,03	82,24	82,40	82,6	82,8	83	83,2

## **Sasaran 1. Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau.**

### **Indikator : Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah suatu ukuran yang menggambarkan kualitas konsumsi pangan masyarakat berdasarkan keberagaman dan keseimbangan gizi yang dianjurkan. Indikator ini dihitung berdasarkan komposisi konsumsi pangan penduduk yang dibandingkan dengan komposisi ideal sesuai Pola Pangan Harapan yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional. Nilai Skor PPH yang lebih tinggi menunjukkan bahwa konsumsi pangan masyarakat semakin beragam, bergizi seimbang, dan mendekati pola ideal, sehingga dapat menjadi tolok ukur keberhasilan kebijakan ketahanan pangan dalam meningkatkan mutu konsumsi pangan. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) bertujuan untuk:

1. Memantau perkembangan kualitas konsumsi pangan masyarakat dari waktu ke waktu.
2. Menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program yang mendukung perbaikan gizi dan keberagaman pangan.
3. Mengevaluasi efektivitas intervensi ketahanan pangan dan gizi di masyarakat.
4. Memberikan gambaran tentang pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat Kota Balikpapan sesuai pedoman konsumsi pangan ideal.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Balikpapan pada periode 2022 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan perbaikan. Pada tahun 2022, skor PPH tercatat sebesar 86,10, meningkat menjadi 88,60 pada tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi 87,35 pada tahun 2024. Perubahan ini mengindikasikan bahwa kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Balikpapan relatif baik, namun masih memerlukan penguatan program agar konsistensinya terjaga. Faktor yang memengaruhi capaian ini antara lain pelaksanaan program diversifikasi pangan, edukasi gizi seimbang, peningkatan akses terhadap pangan lokal, serta kebijakan pengendalian harga bahan pangan.

Target skor PPH untuk periode 2025 hingga 2030 direncanakan meningkat secara bertahap, dimulai dari 87,35 pada tahun 2025, 87,66 pada 2026, 87,98 pada 2027, 88,29 pada 2028, 88,60 pada 2029, dan mencapai 88,91 pada 2030. Target ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Balikpapan melalui DKP3 untuk terus memperbaiki kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penguatan ketahanan pangan, optimalisasi pemanfaatan pangan lokal, serta edukasi dan promosi gizi seimbang.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator penting yang tidak hanya menggambarkan keberagaman konsumsi pangan, tetapi juga menjadi tolok ukur efektivitas kebijakan ketahanan pangan daerah. Tren perbaikan dan target yang telah ditetapkan menunjukkan upaya positif dalam meningkatkan mutu konsumsi pangan masyarakat Kota Balikpapan. Namun, pencapaian target tersebut memerlukan kebijakan yang konsisten, inovasi pengembangan pangan lokal, serta sinergi lintas sektor untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang optimal bagi seluruh warga kota.

## **Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

### **Indikator : Nilai AKIP Perangkat Daerah**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan mekanisme penilaian yang digunakan untuk mengukur sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran strategisnya secara transparan, efisien, dan efektif sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bagi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan, penerapan SAKIP menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan, penguatan sektor pertanian dan perikanan, serta peningkatan kesejahteraan pelaku usaha di bidang terkait.

Penilaian akuntabilitas kinerja ini bertujuan untuk menjamin bahwa perangkat daerah dapat mempertanggungjawabkan capaian kinerjanya kepada publik dan *stakeholders* melalui proses evaluasi yang obyektif dan terstandarisasi. Tujuan pengukuran akuntabilitas kinerja meliputi:

1. Meningkatkan Transparansi, dengan memastikan informasi kinerja Dinas dapat diakses dan dipahami oleh publik.
2. Mendorong Efisiensi, melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya (anggaran, SDM, dan waktu) untuk mencapai target pembangunan daerah.
3. Mewujudkan Evaluasi Berkelanjutan, dengan memberikan rekomendasi perbaikan berbasis data dan hasil analisis kinerja.
4. Mengimplementasikan Regulasi, khususnya amanat Permen PAN RB No. 88 Tahun 2021 serta peraturan pelaksana di tingkat Pemerintah Kota Balikpapan.

Dengan demikian, SAKIP tidak hanya menjadi alat pengendali dan evaluasi, tetapi juga menjadi pendorong terciptanya kinerja yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (*outcome*) di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan di Kota Balikpapan. Sistem penilaian SAKIP berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan No. 02 Tahun 2023 mencakup beberapa komponen utama, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja (Bobot 30%), mencakup kesesuaian dokumen perencanaan (RPJMD dan Renstra) dengan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).
2. Pengukuran Kinerja (Bobot 30%), terkait dengan ketersediaan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta mekanisme pengumpulan data yang valid dan terstandarisasi.
3. Pelaporan Kinerja (Bobot 15%), menekankan pada kualitas laporan kinerja (LKjIP) dan ketepatan waktu publikasi kepada publik.
4. Evaluasi Internal (Bobot 25%), meliputi pelaksanaan evaluasi mandiri serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi.

Untuk Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan, capaian nilai akuntabilitas kinerja pada periode 2020–2024 menunjukkan tren yang cukup baik dengan rata-rata skor 81,2 (kategori Memuaskan). Target peningkatan nilai SAKIP tahun 2025–2030 ditetapkan secara gradual hingga mencapai 83,2 pada tahun 2030. Dengan demikian, diperlukan peningkatan sebesar 2,17 poin, yang difokuskan pada strategi berikut:

1. Penguatan Evaluasi Internal (Bobot 25%), agar hasil evaluasi menjadi lebih mendalam dan berkelanjutan.

2. Pemanfaatan Teknologi Pemantauan Real-Time, untuk mempercepat proses monitoring dan pengambilan keputusan berbasis data.
3. Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja (Bobot 15%), dengan mendorong laporan yang lebih transparan, akurat, dan tepat waktu.
4. Optimalisasi Integrasi Data Lintas Sektor (Crosscutting), guna memperkuat kolaborasi dengan perangkat daerah lain dalam mendukung pembangunan pangan, pertanian, dan perikanan.

Secara keseluruhan, penerapan SAKIP di DKP3 Kota Balikpapan telah menunjukkan perkembangan positif, meskipun masih diperlukan penyempurnaan terutama pada aspek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal.

### **3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Untuk mewujudkan tujuan “Meningkatnya Ketahanan Pangan” pada periode 2025–2029, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Balikpapan menetapkan strategi pembangunan yang diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, serta pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat. Penyusunan strategi ini mempertimbangkan kondisi eksisting daerah, potensi sumber daya, serta isu strategis yang berkembang di tingkat lokal, regional, maupun nasional.

Dalam rangka merumuskan strategi tersebut, dilakukan analisis SWOT untuk memahami kondisi internal dan eksternal organisasi. Analisis ini memberikan gambaran mengenai kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) yang dihadapi DKP3 Kota Balikpapan.

1. Strengths (Kekuatan): ketersediaan lahan potensial, dukungan regulasi, SDM berpengalaman, serta komoditas pangan strategis yang diminati.
2. Weaknesses (Kelemahan): keterbatasan lahan akibat alih fungsi, produktivitas rendah, kelembagaan petani/nelayan belum optimal, ketergantungan pada pasokan luar daerah, serta infrastruktur pendukung terbatas.
3. Opportunities (Peluang): meningkatnya kebutuhan pangan karena pertumbuhan penduduk dan IKN, dukungan kebijakan nasional, perkembangan teknologi, potensi produk olahan bernilai tambah, serta peluang kemitraan dengan swasta dan akademisi.
4. Threats (Ancaman): fluktuasi harga pangan, perubahan iklim, ketergantungan impor, persaingan pasar antar daerah, dan tekanan urbanisasi terhadap ruang usaha tani.

Hasil analisis SWOT menghasilkan formulasi strategi sebagai berikut:

1. Strategi S–O (Strengths–Opportunities): memanfaatkan potensi pasar dan dukungan kebijakan nasional untuk memperkuat produksi pangan lokal, mengembangkan produk olahan berbasis komoditas daerah, serta meningkatkan akses pasar melalui digitalisasi dan kemitraan swasta.
2. Strategi S–T (Strengths–Threats): menggunakan dukungan regulasi untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat kelembagaan petani/nelayan dalam menghadapi persaingan, serta mendorong diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan impor.

3. Strategi W-O (Weaknesses–Opportunities): meningkatkan produktivitas melalui teknologi, membangun infrastruktur pendukung seperti irigasi dan cold storage, serta meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan.
4. Strategi W-T (Weaknesses–Threats): mengendalikan alih fungsi lahan dengan kebijakan tata ruang, memperkuat produksi lokal guna mengurangi ketergantungan pasokan luar daerah, serta membangun sistem ketahanan pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2025–2029, maka penyelenggaraan pembangunan dilakukan secara bertahap setiap tahun dengan menetapkan prioritas pembangunan tahunan. Penahapan ini dimaksudkan agar arah kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan dapat dijalankan secara terukur, konsisten, dan berkesinambungan, serta memungkinkan adanya evaluasi dan penyesuaian sesuai dinamika pembangunan daerah. Penahapan Renstra DKP3 Kota Balikpapan dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 8. Penahapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Tersusunnya rencana penguatan ketahanan pangan melalui intervensi lintas sektor dan pelibatan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan dan akses pangan melalui optimalisasi program pangan lokal dan cadangan pangan pemerintah	Meningkatnya konsumsi pangan bergizi dan aman oleh masyarakat	Terintegrasi sistem distribusi dan pengawasan pangan segar berbasis wilayah rentan pangan	Tercapainya sistem ketahanan pangan daerah yang tangguh, berkelanjutan, dan adaptif terhadap krisis pangan
1. Penyusunan Perencanaan (DED) Kegiatan Urban Farming / Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)	1. Pelaksanaan Urban Farming / Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)	1. Pelaksanaan Urban Farming / Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)	1. Pelaksanaan Urban Farming / Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)	1. Pengembangan Urban Farming / Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)
2. Penyusunan Perencanaan (DED) Pengembangan RPH Terpadu	2. Pengembangan RPH Terpadu (Ruminansia dan Unggas)	2. Pengembangan Balai Budidaya Air Tawar (BBAT)	2. Penyusunan PETA FSVA	2. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)
3. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	3. Pengembangan / Rehabilitasi BPP Teritip	3. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	3. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	3. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM)
4. Pengelolaan LP2B	4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Veteriner	4. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM)	4. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM)	4. Penyediaan Sarana Budidaya BIOFLOK

5. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM)	5. Penyusunan Kajian Pengelolaan Balai Budidaya Air Tawar (BBAT) dan DED Pembangunan Budidaya Air Tawar (BBAT)	5. Penyediaan Sarana Budidaya BIOFLOK	5. Penyediaan Sarana Budidaya BIOFLOK	
6. Penyediaan Sarana Budidaya BIOFLOK	6. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)			
	7. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM)			
	8. Penyediaan Sarana Budidaya BIOFLOK			

Dengan strategi yang terarah dan berkesinambungan ini, DKP3 Kota Balikpapan berkomitmen memperkuat fondasi ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pembudidaya ikan, serta memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan berkelanjutan.

### 3.4 Arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada periode 2025–2029, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Balikpapan menetapkan arah kebijakan yang difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, pemberdayaan pelaku usaha, serta pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Arah kebijakan tersebut meliputi :

Tabel 9. Arah Kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
Ketahanan Pangan	<b>Peningkatan ekosistem ekonomi kreatif dan inovatif yang berkelanjutan.</b>	Meningkatkan diversifikasi dan inovasi produk pangan lokal yang berdaya saing dan aman konsumsi.
		Mendorong UMKM pangan untuk mengembangkan produk kreatif berbasis bahan baku lokal dengan standar mutu dan keamanan pangan.
Pertanian		Mengembangkan inovasi pertanian berbasis teknologi ramah lingkungan yang mendukung hilirisasi dan agroindustri kreatif.

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
		<p>Meningkatkan kapasitas kelompok tani dan pelaku usaha pertanian dalam menghasilkan produk bernilai tambah dan berorientasi pasar.</p> <p>Mendorong pemanfaatan limbah ternak menjadi produk inovatif (biogas, pupuk organik, kerajinan berbasis kulit/ tulang).</p> <p>Meningkatkan kapasitas peternak milenial dan UMKM peternakan dalam hilirisasi produk bernilai tambah.</p> <p>Memperkuat pengendalian dan pencegahan penyakit hewan menular strategis (PHMS) agar usaha peternakan berkelanjutan dan aman.</p> <p>Fasilitasi sertifikasi kesehatan hewan dan keamanan pangan asal hewan (NKV – Nomor Kontrol Veteriner, halal, higienitas).</p> <p>Meningkatkan jaminan kesehatan hewan dan keamanan produk asal ternak untuk mendukung industri pangan kreatif.</p>
Perikanan		<p>Meningkatkan pengolahan hasil perikanan melalui inovasi produk kreatif yang berdaya saing lokal, nasional, dan ekspor.</p> <p>Memperkuat ekosistem usaha perikanan melalui fasilitasi sertifikasi mutu, izin usaha, dan pemasaran digital.</p>
Ketahanan Pangan	<b>Pengendalian inflasi daerah</b>	<p>Meningkatkan ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan pokok strategis melalui optimalisasi cadangan pangan pemerintah daerah.</p> <p>Memperkuat sistem pemantauan harga dan pasokan pangan berbasis data harian untuk mendukung kebijakan TPID.</p> <p>Melaksanakan intervensi harga pangan (operasi pasar, subsidi ongkos angkut, gelar pangan murah) pada saat gejolak inflasi.</p>
Pertanian		<p>Mendorong peningkatan produksi komoditas pertanian penyumbang inflasi (beras, cabai, bawang merah) melalui intensifikasi, pengendalian OPT, dan pemanfaatan teknologi.</p> <p>Melaksanakan pengawasan kesehatan hewan dan keamanan produk ternak agar tetap layak konsumsi, sehingga tidak terjadi panic buying akibat isu penyakit hewan.</p>



Dengan arah kebijakan tersebut, DKP3 Kota Balikpapan berkomitmen untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif, sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan kota serta memperkuat kontribusi daerah dalam pembangunan regional dan nasional.

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan merupakan hasil dari proses cascading yang sistematis dari tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Proses cascading ini memastikan adanya kesinambungan antara arah pembangunan jangka menengah dengan pencapaian indikator kinerja utama, dimana setiap program dirancang untuk berkontribusi langsung terhadap sasaran, dan setiap kegiatan serta sub kegiatan mendukung pencapaian outcome maupun output yang telah ditetapkan. Dengan demikian, terdapat keterkaitan yang jelas antara level perencanaan strategis dan level operasional, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terukur, terarah, dan akuntabel.

Dalam penyusunannya, program, kegiatan, dan sub kegiatan tidak hanya diposisikan sebagai instrumen teknis, tetapi juga sebagai representasi dari komitmen Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan sektor ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan. Outcome yang dihasilkan dari kegiatan dirancang agar dapat berkontribusi pada sasaran yang lebih luas, sementara output yang diperoleh dari sub kegiatan menjadi capaian nyata yang langsung dirasakan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Seluruh perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan ini mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) mengenai pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah, termasuk pemutakhiran dan penyesuaian regulasi yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menjamin keselarasan dengan kerangka hukum nasional, serta mencegah terjadinya duplikasi maupun ketidaksesuaian antar tingkatan perencanaan. Dengan adanya acuan nomenklatur tersebut, setiap program dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun substansial, sekaligus mendukung konsistensi pembangunan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi.

Dengan pendekatan cascading dan kesesuaian nomenklatur ini, Renstra DKP3 Kota Balikpapan periode 2025–2029 diharapkan dapat menjadi instrumen perencanaan yang tidak hanya komprehensif dan operasional, tetapi juga fleksibel dalam menghadapi dinamika pembangunan, sehingga sasaran pembangunan dapat dicapai secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

#### **4.1 Uraian Program**

Program kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan, lengkap dengan rencana capaian kinerja yang terukur pada tingkat sasaran dan kegiatan, baik untuk indikator hasil (outcome) maupun keluaran (output). Penyusunan program kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta mencerminkan komitmen Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan dalam mencapai target pembangunan pada setiap tahun pelaksanaan.

Dalam konteks tersebut, program-program DKP3 Kota Balikpapan dirancang secara terintegrasi untuk menjawab isu strategis daerah sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional. Melihat dari Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan, maka disusunlah program-program kerja Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Balikpapan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan
4. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
6. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
8. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
9. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
10. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
11. Program Penyuluhan Pertanian
12. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan program yang konsisten setiap tahunnya, DKP3 Kota Balikpapan berkomitmen untuk mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh, pertanian yang produktif dan berdaya saing, serta perikanan yang berkelanjutan. Seluruh program ini sekaligus menjadi instrumen nyata dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi pembangunan Kota Balikpapan, serta mendukung ketahanan pangan nasional di era pembangunan yang semakin dinamis.

#### **4.2 Uraian Kegiatan**

Kegiatan yang dirancang dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan periode 2025–2029 merupakan langkah operasional dari program-program utama yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan disusun untuk menjawab sasaran strategis dan diarahkan agar memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja perangkat daerah. Kegiatan yang dilaksanakan juga mempertimbangkan kondisi eksisting, kebutuhan masyarakat, serta prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya, sehingga implementasinya tidak hanya bersifat administratif tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kegiatan-kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan sebagai penjabaran program - program adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
3. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
4. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

5. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
6. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota
7. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
8. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
9. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
10. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
11. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
12. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
13. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
14. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
15. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
16. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
17. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
18. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
19. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
20. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
21. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
22. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
23. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
24. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
25. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2025–2029 menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap program yang telah dirumuskan dapat berjalan secara terarah, terukur, dan berkesinambungan. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, DKP3 Kota Balikpapan tidak hanya berupaya mewujudkan ketahanan pangan yang kokoh dan sektor pertanian serta perikanan yang berdaya saing, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan daerah yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas.

#### **4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, target dan pagu indikatif**

Sub kegiatan merupakan rincian operasional dari kegiatan yang telah ditetapkan, dengan tujuan memastikan pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan sesuai sasaran. Sub kegiatan disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, kondisi eksisting masyarakat, serta prioritas tahunan yang telah ditetapkan dalam penahapan Renstra. Melalui sub kegiatan inilah, program dan kegiatan dapat diwujudkan dalam bentuk aksi nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan. Berikut adalah Sub Kegiatan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan di DKP3 :

1. Sub Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
2. Sub Kegiatan Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota
3. Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
5. Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
6. Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
7. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
8. Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
9. Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
10. Sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
11. Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
12. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
13. Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
14. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
15. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
16. Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
17. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
18. Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
19. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
20. Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
21. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
22. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
23. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan
24. Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
25. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
26. Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
27. Sub Kegiatan Pembinaan Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi pada Unit Usaha Produk Hewan

28. Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
29. Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
30. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
31. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
32. Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
33. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
34. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
35. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
36. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
37. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
38. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
39. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
40. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
41. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
42. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
43. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
44. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
45. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
46. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
47. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
48. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
49. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
50. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
51. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
52. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
53. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
54. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
55. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
56. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
57. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
58. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
59. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
60. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
61. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program, kegiatan dan Sub. Kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 10. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra DKP3 Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan
TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN YANG BERKUALITAS					INDEKS KETAHANAN PANGAN	
	MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN				PREVALENSI KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN (PKKP)/PREVALENCY OF UNDERNOURISHMENT (PoU)	
		SASARAN 1 : MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DAN PEMANFAATAN PANGAN YANG BERKUALITAS DAN TERJANGKAU			SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH)	
			Meningkatnya Kecukupan Konsumsi Energi Masyarakat		Tingkat Konsumsi Energi (Satuan : %)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
				Terlaksananya kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan	1. Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 2. Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan
					Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
					Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (ton)	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (ton)	Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
				Tercapainya target konsumsi pangan perkapita sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG)	1. Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2. Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
					Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (laporan)	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
					Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (dokumen)	Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
			Menurunnya Jumlah Wilayah Rentan Rawan Pangan		Persentase daerah rentan rawan pangan (Satuan : %)	Program Penanganan Kerawanan Pangan



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan
				Tersusunnya dokumen peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
					Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
			Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan		Persentase Pengawasan Jumlah Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan ( Satuan : %)	Program Pengawasan Keamanan Pangan
				Terlaksananya kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	1. Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 2. Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (dokumen)	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (dokumen)	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Satuan : Ton)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan
				Meningkatnya pemberdayaan bagi kelompok nelayan	1. Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya 2. Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 3. Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota
					Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat Kapasitasnya (Orang)	Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
					Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	Sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Kecil (Unit)	Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Satuan : Ton)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
				Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan penguatan kelembagaan bagi kelompok pembudidaya ikan	1. Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 2. Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
					Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
				Terselenggaranya penyaluran prasarana dan sarana perikanan	1. Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
			Meningkatnya produk olahan perikanan		Volume Produksi Olahan Perikanan (Satuan : Ton)	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
				Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan kepada pelaku usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan
					Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	<p>Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesu</p> <p>6 of 11</p> <p>Meningkatnya Dukungan Prasarana Pertanian Terhadap Produktivitas Pertanian</p>
			Meningkatnya Akses masyarakat penggiat sektor pertanian		Persentase Jumlah masyarakat penggiat sektor pertanian yang mendapat Akses Bantuan sarana pertanian (Satuan : %)	<p>ai Skala Usaha dan Risiko</p> <p>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</p>

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan
			Terhadap Sarana Pertanian			
				Terlaksananya Pengawasan dan Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian	1. Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 2. Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (laporan)	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (laporan)	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
			Meningkatnya Dukungan Prasarana Pertanian Terhadap Produktivitas Pertanian		Produktivitas pertanian per hektar per tahun (satuan : ton/ha)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan
				Terlaksananya pengelolaan LP2B/KP2B/LCP2B serta koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya.	1. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
					Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (dokumen)	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
				Tersedianya prasarana pertanian hasil pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan	1. Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 2. Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 3. Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
					Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (unit)	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan
			Terkendalnya penyebaran penyakit hewan menular strategis		Persentase wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis (Satuan : %)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
				Terlaksananya penanganan dan pengendalian kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (laporan)	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Terselenggaranya pengujian sampel hewan dan produk hewan di laboratorium veteriner sesuai standar	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan
				Terselenggaranya pengawasan dan pembinaan yang efektif terhadap peredaran dan pengelolaan produk hewan, untuk menjamin mutu, keamanan, dan kelayakan konsumsi pangan asal hewan di tingkat masyarakat.	1. Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 2. Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (unit usaha)	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
					Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
					Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (unit usaha)	Sub Kegiatan Pembinaan Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi pada Unit Usaha Produk Hewan
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Satuan : %)	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan
				Terlaksananya pengendalian dan penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.	1. Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 2. Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
					Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (hektar)	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
					Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Hektar)	Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
			Meningkatnya kelembagaan ekonomi petani yang terfasilitasi untuk mendukung usaha tani		Persentase Kelompok Masyarakat Penggiat Pertanian yang aktif	Program Penyuluhan Pertanian
				Meningkatnya pemberdayaan Kelompok Tani atau Kelompok Masyarakat Penggiat Pertanian	1. Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2. Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 3. Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan
					Jumlah Kelembagaan Petani yang ditingkatkan Kapasitasnya	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
					Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan yang disediakan dan dimanfaatkan (unit)	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
					Jumlah Sekolah Lapang (SL) Kelompok Tani atau Kelompok Masyarakat Penggiat Tanaman Pertanian yang terbentuk dan terselenggara di tingkat Kabupaten/Kota (unit).	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
		SASARAN 2 : MENINGKTANYA KUALITAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH			NILAI AKIP PERANGKAT DAERAH	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan
				Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 5. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 6. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7. Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, akuntabel, dan transparan.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersusunnya dokumen administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah secara tertib dan akuntabel	Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (pemagaran lahan aset)	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan
				Terwujudnya profesionalisme aparatur perangkat daerah.	1. Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 2. Jumlah yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
					Jumlah yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
				Terwujudnya layanan umum perkantoran perangkat daerah.	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 5. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	1. Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4. Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah paket mebel yang disediakan	Pengadaan Mebel
					Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Pengadaan Aset Tak Berwujud
				Terwujudnya operasional umum perangkat daerah.	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan
					Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
					Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar berfungsi optimal.	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4. Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 5. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya



<b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program/Kegiatan/Subkegiatan</b>
					Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
					Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran lebih operasional dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Penyusunan ini berfungsi untuk memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan dapat diwujudkan melalui langkah-langkah yang terencana, sistematis, serta didukung alokasi sumber daya yang memadai.

Program merupakan instrumen utama pembangunan yang mengarah pada pencapaian outcome sesuai dengan mandat urusan pemerintahan daerah. Setiap program kemudian diturunkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan keluaran (output) terukur, dan selanjutnya dijabarkan lebih detail ke dalam sub kegiatan yang bersifat teknis dan langsung menyentuh masyarakat maupun pelaku usaha. Struktur ini merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, indikator outcome, dan output yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga keterkaitan antarlevel perencanaan dapat terjaga secara konsisten.

Dalam hal pendanaan, penyusunan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, arah kebijakan pembangunan daerah, serta dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun potensi kerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat. Penganggaran diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan tahunan yang telah disepakati, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ketahanan pangan, produktivitas pertanian dan perikanan, serta kesejahteraan masyarakat.

Dengan penyusunan rencana ini, DKP3 Kota Balikpapan berupaya memastikan adanya keterpaduan antara aspek perencanaan dan penganggaran. Hal ini penting agar pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat terukur, terarah, dan mampu berkontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Rencana tersebut selanjutnya disajikan secara lebih rinci dalam bentuk tabel program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan untuk periode 2025–2029.

Adapun rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Bidang Urusan/Program	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Aktivitas
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
URUSAN PANGAN																
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Konsumsi Energi (Satuan : %)	%	0,039	0,04	756.737.347,5	0,05	848.833.557,5	0,05	1.835.000.000	0,05	1.990.000.000	0,05	2.190.000.000	0,05	2.390.000.000	
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	1. Jumlah kegiatan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 2. Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota				0		103.961.320		385.000.000		410.000.000		440.000.000		490.000.000	
Sub Kegiatan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Laporan	4	4	0	4	78.961.320	4	350.000.000	4	375.000.000	4	400.000.000	4	450.000.000	Pelaksanaan Sub kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan Pengumpulan Data Pangan Harian (Panel Harga Pangan) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan 1 minggu 3 kali (hari Selasa, Sabtu dan Minggu), pada Hari Besar Keagamaan Nasional (Menjelang Idul Fitri dan Natal), pada Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS). dalam pelaksanaannya dibutuhkan :

																penyediaan peralatan dan perlengkapan (Meja, Kursi, Tenda), Uang Transportasi bagi peserta GPM, Makan Minum Kegiatan dan Fasilitas Distribusi Produk Pangan serta Belanja Media Promosi/Publikasi (Backdrop, Spanduk, Souvenir)
Sub Kegiatan Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	0	1	25.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan dilakukan untuk memperkirakan ketersediaan, kebutuhan, dan potensi defisit atau surplus pangan di wilayah Kota Balikpapan dalam periode tertentu. Proyeksi ini mencakup analisis terhadap produksi lokal, distribusi, konsumsi, hingga potensi pasokan dari luar daerah. Untuk menunjang pelaksanaan Sub Kegiatan dibutuhkan antara lain : <b>Makan dan Minum Rapat Koordinasi Lintas Sektor dan Survei Stok Pangan di Pasar yang dilakukan oleh Mitra dan diberikan bantuan transportasi</b>

<b>Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</b>				<b>569.513.160</b>		<b>566.500.000,0 0</b>		<b>900.000.000</b>		<b>980.000.000</b>		<b>1.100.000.0 00</b>		<b>1.200.000.0 00</b>	
Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	24,012	25	569.513.160	35	566.500.000,0 0	37	900.000.000	39	980.000.000	41	1.100.000.00 0	42	1.200.000.0 00	Cadangan Pangan ini berbentuk stok fisik komoditas pangan pokok yang dikuasai oleh pemerintah dan disiapkan untuk digunakan sewaktu-waktu sebagai bentuk intervensi dalam situasi sebagai berikut: 1)Terjadinya kekurangan pangan, 2) Keadaan darurat, 3)Gejolak harga pangan, 4) Dukungan bagi masyarakat miskin, 5) Wilayah yang mengalami kerawanan pangan, 6) Penanggulangan stunting, 7) Penanganan kasus gizi buruk, dan/atau 8) Bantuan pangan antar daerah. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dibutuhkan : <b>Pengadaan Beras dan Protein, Belanja Kemasan, Media Publikasi (Spanduk), Biaya Transportasi Distribusi Pangan</b>

																(Ongkos angkut dari Gudang Ke titik Lokasi sasaran penerima serta biaya buruh) , Makan dan Minum Kegiatan/Rapat
Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1. Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2. Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				187.224.187,5		178.372.237,50		550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000	
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	9	4	187.224.187,5	2	78.372.237,50	2	250.000.000	2	250.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	Sub Kegiatan ini berfokus pada Pemberdayaan/Sosialisasi/ Edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pola makan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), serta mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal sebagai

																alternatif sumber pangan utama. pelaksanaan Sub Kegiatan ini ditunjang oleh : <b>pengadaan bahan praktek pemberdayaan kelompok masyarakat, Honorarium dan Transportasi Narasumber, Uang Transportasi Peserta, Makan dan Minum Kegiatan, alat dan bahan praktek pengolahan pangan lokal, serta Peningkatan Kapasitas bagi ASN dalam rangka Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (SKor PPH) (Biaya Kontribusi Bimtek dan Perjalanan Dinas)</b>
Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen	N/A	N/A	0	2	100.000.000	5	300.000.000	5	350.000.000	6	350.000.000	6	400.000.000	Merupakan SUB Kegiatan baru yang diusulkan pada Renstra Periode 2025-2029. Bentuk kegiatan promosi meliputi kampanye publik, gelar pangan lokal, lomba cipta menu B2SA, penyebaran materi edukatif melalui media cetak dan digital, serta kolaborasi dengan pelaku usaha dan

																komunitas lokal. Untuk menunjang pelaksanaan sub kegiatan dibutuhkan : <b>Media Publikasi, Makan dan Minum Kegiatan, Souvenir Pangan Lokal (berupa Sayur/Buah), Honorarium Narasumber dan Alat dan Bahan Praktek Demonstrasi Pengolahan Pangan Lokal.</b>
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	14,7	14,7	51.148.050	13	35.000.000	12	50.000.000	10	50.000.000	9	50.000.000	8	50.000.000	
Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan				51.148.050		35.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan	Dokumen	1	1	51.148.050	1	35.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Pelaksanaan Sub Kegiatan ini untuk memetakan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan secara spasial di kota Balikpapan, yang mana mencakup pengumpulan data indikator-indikator utama seperti ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan seperti kemiskinan, bencana, dan infrastruktur.



																Untuk menunjang pelaksanaan sub kegiatan dibutuhkan : makan minum rapat Koordinasi Lintas Sektor, Souvenir bagi Tim Teknis, Honorarium dan Perjalanan Dinas bagi Narasumber, Peningkatan Kapasitas ASN DKP3 dalam rangka penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/FSVA (Kontribusi dan Perjalanan Dinas) dan Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKEPANG)
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Jumlah Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan	%	70	84,00	282.573.750	84,67	200.573.750	85,33	350.000.000	86	450.000.000,00	86,67	450.000.000,00	87,33	500.000.000,00	
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 2. Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				282.573.750		200.573.750		350.000.000		450.000.000		450.000.000		500.000.000	

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	2	2	282.573.750	2	155.000.000	2	200.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	300.000.000	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan di Daerah Kabupaten/Kota merupakan upaya dalam menyediakan fasilitas untuk menguji keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan, seperti <b>penyediaan alat uji keamanan dan mutu pangan, peralatan dan bahan penunjang uji (misalnya masker, sarung tangan, plastik food grade berklip), Biaya pengiriman dan biaya pengujian sampel di laboratorium terakreditasi.</b>
Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1	1	0	1	45.573.750	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	Sub Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mengawasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan di daerah, untuk menunjang pelaksanaan sub kegiatan dibutuhkan : <b>Makan dan Minum Kegiatan, Biaya Promosi/Publika</b>

																si (Leaflet, spanduk, Banner, Poster, Seminar Kit, Videotron, Billboard), Peningkatan Kompetensi SDM Pengawas (biaya kontribusi dan perjalanan dinas), biaya transportasi peserta, Honorarium dan Biaya Perjalanan Dinas Narasumber
URUSAN PERIKANAN																
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	4.019	4.500	259.814.300	4.600	599.771.580	4.610	800.000.000	4.690	900.000.000	4.784	1.000.000.000	4.880	1.100.000.000	
Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota	1. Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 2. Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 3. Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				259.814.300		599.771.580		800.000.000		900.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000	

Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat Kapasitasnya	orang	120	110	141.566.800	150	423.924.080	150	300.000.000	150	325.000.000	150	350.000.000	150	375.000.000	Pengembangan kapasitas pelaku usaha perikanan dilaksanakan melalui berbagai bentuk fasilitasi yang diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian usaha. Upaya ini diwujudkan dalam bentuk pelatihan teknis, bimbingan usaha, pembinaan berkelanjutan, hingga penyediaan sarana pendukung yang relevan dengan kebutuhan lapangan. Kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan individu, tetapi juga pada penguatan kelembagaan dan daya saing usaha perikanan agar mampu beradaptasi dengan dinamika pasar dan tantangan lingkungan. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, dialokasikan belanja berupa alat dan bahan praktik, konsumsi kegiatan, belanja promosi dalam
---	--	-------	-----	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	--

																bentuk souvenir, honorarium serta perjalanan dinas bagi narasumber, serta belanja rapat sinkronisasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat.
Sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	kelompok	6	6	118.247.500	6	175.847.500	8	150.000.000	8	175.000.000	8	200.000.000	8	225.000.000	Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat kemandirian dan keberlanjutan usaha nelayan kecil melalui fasilitasi pembentukan serta pengembangan kelembagaan nelayan. Fokus kegiatan diarahkan pada pembinaan dan pendampingan kelompok nelayan, peningkatan legalitas badan hukum kelembagaan, penyusunan administrasi organisasi, pelatihan tata kelola kelembagaan, serta penguatan akses terhadap permodalan, teknologi, dan pasar. Dalam pelaksanaannya, sub kegiatan ini difokuskan pada fasilitasi sejumlah kelompok nelayan yang menjadi sasaran pembinaan,

																	dengan asumsi 1 (satu) kelompok nelayan terdiri dari 10 orang anggota. Indikator capaian kegiatan ini tidak hanya diukur dari jumlah kelompok yang memperoleh pembinaan dan penguatan kelembagaan, tetapi juga mencakup pendataan produksi perikanan tangkap sebagai bagian dari upaya memperkuat basis data perikanan di Kota Balikpapan
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Kecil	unit	160	0	0	0	0	150	350.000.000	200	400.000.000	200	450.000.000	200	500.000.000	Sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keselamatan nelayan skala kecil melalui penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap yang memadai. Dukungan ini difokuskan pada penyediaan mesin kapal, alat tangkap dan alat bantu penangkapan, peralatan keselamatan kerja, serta alat navigasi laut. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut dihitung per unit, sehingga dapat dipastikan ketepatan jumlah dan distribusi kepada kelompok nelayan yang menjadi sasaran. Selain itu, dalam pelaksanaan sub kegiatan ini juga mencakup aktivitas pemeliharaan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) apabila dibutuhkan, sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan fasilitas pendukung rantai usaha perikanan tangkap. Untuk menunjang
---	--	------	-----	---	---	---	---	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	---

																keberhasilan kegiatan, dialokasikan belanja berupa pengadaan mesin kapal, alat tangkap dan alat bantu penangkapan, peralatan keselamatan kerja, serta alat navigasi laut. Selain belanja utama tersebut, juga dialokasikan belanja pendukung berupa konsumsi kegiatan, serta belanja rapat sinkronisasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat guna memastikan keselarasan program dengan kebijakan yang lebih luas.
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Satuan : Ton)	Ton	163,47	312	1.400.372.803	319	1.370.470.818	320	2.390.000.000	327	11.670.000.000,00	333	2.500.000.000,00	340	2.550.000.000,00	
Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	1. Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 2. Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				205.389.485		177.687.500		400.000.000		475.000.000		550.000.000		600.000.000	



Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	kelompok	3	5	57.437.500	5	57.437.500	7	100.000.000	7	125.000.000	9	150.000.000	9	150.000.000	Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung penguatan kelembagaan pembudi daya ikan kecil. Kegiatan mencakup pendampingan teknis kelembagaan, pembinaan administrasi kelompok, pelatihan manajemen usaha dan organisasi, serta fasilitas akses kelompok terhadap sarana produksi, pembiayaan, teknologi budidaya, dan pemasaran hasil. Fasilitas juga diarahkan untuk mendorong legalitas kelompok. untuk menunjang pelaksanaan sub kegiatan dibutuhkan : biaya legalitas kelompok (notaris), uang pembinaan untuk penilaian kelompok, makan minum kegiatan pertemuan kelompok dan kegiatan sosialisasi, belanja media promosi/pembelajaran (souvenir), uang transportasi
---	---	----------	---	---	------------	---	------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	--

																peserta dan honorarium narasumber
Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	kel om pok	2	2	147.951.985	2	120.250.000	9	300.000.000	11	350.000.000	15	400.000.000	17	450.000.000	Sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelaku utama sektor Perikanan melalui pemberian pendampingan serta kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Sub kegiatan ini juga mencakup penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang bersifat teknis, manajerial, maupun tematik sesuai kebutuhan lokal dan perkembangan ilmu terkini. untuk menunjang pelaksanaan sub kegiatan dibutuhkan : <b>belanja makan minum kegiatan, honorarium dan</b>

																perjalanan dinas narasumber, belanja alat dan bahan praktek, uang transportasi peserta, peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM ASN
Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1. Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				1.194.983.318		1.192.783.318		1.990.000.000		11.195.000.0 00		1.950.000.0 00		1.950.000.0 00	

Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	uni t	2	2	1.146.369.318	2	1.110.369.318	3	1.540.000.000	3	11.020.000.00 0	3	1.750.000.00 0	3	1.750.000.0 00	Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pengembangan sarana dan prasarana budidaya yang menjadi salah satu prioritas strategis dalam peningkatan produksi perikanan budidaya di Kota Balikpapan. Pengembangan tersebut mencakup <b>Balai Budidaya Ikan Air Tawar (BBAT)</b> , sistem budidaya berbasis teknologi bioflok, serta penguatan tambak perikanan. Upaya ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi perikanan tetapi juga mendukung pengembangan <b>P2B/Urban Farming</b> di kawasan perkotaan. Dalam pelaksanaannya, belanja yang dialokasikan meliputi operasional dan pemeliharaan BBAT, pengembangan atau pembangunan sarana dan prasarana BBAT, serta operasional penunjang lainnya. Selain
---	--	----------	---	---	---------------	---	---------------	---	---------------	---	--------------------	---	-------------------	---	-------------------	--

																itu, juga dialokasikan belanja untuk pengembangan sarana budidaya ikan berbasis <b>bioflok</b> , serta <b>belanja penunjang kegiatan P2B/Urban Farming</b> berupa penyediaan benih, pakan dan sarana budidaya sederhana seperti <b>ember</b> atau <b>tong</b> . Untuk mendukung keselarasan kebijakan dan koordinasi lintas tingkat pemerintahan, kegiatan ini juga dilengkapi dengan <b>belanja rapat sinkronisasi dan koordinasi bersama pemerintah provinsi maupun pusat</b> . Komponen pembentuk indikator dari sub kegiatan ini meliputi <b>pengembangan Balai Budidaya Ikan Air Tawar, penerapan sistem bioflok, serta peningkatan tambak</b> .
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	orang	130	140	48.614.000	130	82.414.000	140	450.000.000	140	175.000.000	150	200.000.000	150	200.000.000	0	Sub kegiatan ini berfokus pada penguatan pengelolaan dan pengendalian mutu dalam sektor perikanan budidaya, yang dilaksanakan melalui berbagai upaya fasilitasi, kajian, serta pembinaan teknis kepada pelaku usaha. Komponen pembentuk indikator dari sub kegiatan ini mencakup tersajinya data produksi perikanan budidaya secara bulanan dan tahunan. Selain itu, dilakukan pula kajian pengelolaan Balai Budidaya Ikan Air Tawar (BBAT) yang dilatarbelakangi oleh keterbatasan jumlah SDM dan pendanaan pada OPD, dengan sasaran menghasilkan rekomendasi model pengelolaan BBAT (baik melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga maupun tetap dikelola oleh OPD dengan strategi penguatan SDM) pada Tahun Anggaran 2027.
---	---	-------	-----	-----	------------	-----	------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	---	--

																Sub kegiatan ini juga meliputi pelaksanaan pertemuan kelompok pembudidaya serta monitoring kualitas air secara berkala sebagai bagian dari pembinaan teknis dan pengendalian mutu lingkungan budidaya. Untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan tersebut, belanja yang dialokasikan meliputi honorarium tim pengumpul data, konsumsi kegiatan pertemuan, belanja pakan untuk peningkatan produksi bagi pembudidaya yang dibina dan dipantau, serta belanja rapat sinkronisasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat.
Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Volume Produksi Olahan Perikanan (Satuan : Ton)	Ton	1.128	N/A	0	N/A	0	1.130	400.000.000	1.132	500.000.000	1.134	700.000.000	1.136	900.000.000	0

<i>Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>	<i>Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko</i>				0		0		400.000.000		500.000.000		700.000.000		900.000.000	
Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	unit	N/A	N/A	0	N/A	0	20	400.000.000	22	500.000.000	24	700.000.000	26	900.000.000	Sub kegiatan ini merupakan inisiatif baru yang mulai diakomodasi dalam dokumen perencanaan periode Renstra 2025–2029. Pada Renstra 2021–2026, program, kegiatan, dan sub kegiatan ini belum tercantum, sehingga target kinerja serta pagu indikatif baru dapat ditetapkan mulai tahun 2027. Pelaksanaan sub kegiatan ini diarahkan untuk mengukur jumlah unit usaha perikanan yang telah dibina oleh perangkat daerah dalam rangka pemenuhan persyaratan legalitas usaha, khususnya terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA). Legalitas tersebut





Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Jumlah masyarakat penggiat sektor pertanian yang mendapat Akses Bantuan sarana pertanian	%	26,00	26,00	894.975.245	26,50	1.000.000.000	27	1.700.000.000	27,50	1.900.000.000	28	2.100.000.000	28,50	2.400.000.000	
Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1. Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 2. Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				894.975.245		1.000.000.000		1.700.000.000		1.900.000.000		2.100.000.000		2.400.000.000	
Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	3	3	228.596.645	5	800.000.000	5	1.350.000.000	5	1.450.000.000	6	1.550.000.000	6	1.700.000.000	Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap iklim ekstrem dan penerapan teknologi pertanian berkelanjutan sebagai upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Selain itu, kegiatan ini juga mencakup dukungan terhadap pengembangan urban farming di dua lokasi setiap tahunnya sebagai bagian dari program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B). Pada tahun 2026 akan dilaksanakan perencanaan teknis / DED

																Pengembangan Urban Farming/Pekarangan Pangan Bergizi (P2B), selanjutnya dari tahun 2027-2030 akan di bangun di 2 lokasi setiap tahunnya.
Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	3	3	666.378.600	5	200.000.000	5	350.000.000	5	450.000.000	6	550.000.000	6	700.000.000	Sub Kegiatan ini tidak hanya difokuskan pada aspek pengendalian dan pemantauan distribusi sarana pertanian, tetapi juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia, untuk memastikan bahwa petani memahami fungsi, cara aplikasi, serta batasan penggunaan sarana pendukung seperti benih unggul, pupuk, bahan kimia/pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan komoditas dan karakteristik agroekosistem wilayah
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/ha	7	8	1.581.266.125	8	1.726.241.370	9	23.920.000.000	9	24.585.000.000	10	15.340.000.000	10	6.100.000.000	

<b>Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>1. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</b> <b>2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola</b>				661.266.125		351.241.370		950.000.000		1.150.000.000		1.300.000.000		1.450.000.000	
Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Dokumen	1	1	161.266.125	1	200.000.000	1	450.000.000	1	550.000.000	1	650.000.000	1	750.000.000	Dilaksanakan sebagai upaya untuk melindungi dan mengoptimalkan fungsi lahan pertanian produktif di kota Balikpapan. Selain itu hal ini menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung target Kementerian Pertanian untuk mewujudkan swasembada beras di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya dalam menghadapi tekanan alih fungsi lahan dan tantangan perubahan iklim.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	N/A	1	500.000.000	1	151.241.370	1	500.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000	Dilaksanakan sebagai bagian dari upaya integratif DKP3 dalam mendukung Pengembangan Daerah Korporasi Ternak (PDKT), yang merupakan salah satu pendekatan modern dalam meningkatkan skala usaha, efisiensi produksi, dan daya saing peternak rakyat. Kegiatan ini mencakup koordinasi lintas sektor dan antar-instansi dalam perencanaan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti kandang ternak, fasilitas pengolahan limbah, pakan, serta bibit ternak.
Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	1. Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 2. Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 3. Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				920.000.000		1.375.000.000		22.970.000.000		23.435.000.000		14.040.000.000		4.650.000.000	

Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	2	55.000.000	2	60.000.000,00	2	220.000.000,00	2	85.000.000	2	90.000.000	2	100.000.000	Sub kegiatan ini bertujuan untuk <b>memperkuat peran kelembagaan penyuluhan</b> sebagai pusat informasi, diseminasi inovasi, serta penguatan kapasitas petani dalam rangka mewujudkan sistem pertanian yang produktif dan berkelanjutan. Dalam mendukung fungsi tersebut, diperlukan upaya pemeliharaan dan pengamanan aset kelembagaan, khususnya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Oleh karena itu, direncanakan penambahan anggaran pada tahun 2026 dan 2027 yang dialokasikan untuk kegiatan rehabilitasi pagar dan pemasangan plang nama BPP, guna meningkatkan identitas kelembagaan dan menciptakan lingkungan yang representatif serta aman bagi kegiatan penyuluhan.
---	---	------	---	---	------------	---	---------------	---	----------------	---	------------	---	------------	---	-------------	---

Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	4	4	0	4	200.000.000,00	4	1.250.000.000,00	5	1.350.000.000	5	1.450.000.000	5	1.550.000.000	Sub Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung keberlanjutan sistem produksi pertanian serta <b>memperkuat fungsi layanan pertanian terpadu di kota Balikpapan.</b> Prasarana yang menjadi sasaran kegiatan ini meliputi berbagai aset pendukung seperti <b>Unit Pengelolaan Air untuk irigasi pertanian, Kebun Buah Lokal KM15, Tempat Pembibitan Tanaman, serta Kebun PKK yang berfungsi sebagai sarana edukasi, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat.</b>
---	---	------	---	---	---	---	----------------	---	------------------	---	---------------	---	---------------	---	---------------	--

Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	1	1	865.000.000	1	1.115.000.000,00	1	21.500.000.000,00	1	22.000.000.000	1	12.500.000.000	1	3.000.000.000	Sub Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjamin tersedianya fasilitas pemotongan hewan yang memenuhi standar teknis, kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet), serta keamanan pangan asal hewan. Kegiatan ini mencakup peningkatan infrastruktur dan operasional RPH agar dapat memberikan layanan pemotongan yang higienis, efisien, serta memenuhi ketentuan halal dan sertifikasi veteriner (NKV). Sebagai bagian dari strategi jangka menengah, <b>pada tahun 2027 direncanakan pengembangan RPH Terpadu yang melayani pemotongan ruminansia (sapi/kambing) dan unggas (ayam) dalam satu kawasan yang dikelola secara modern.</b> RPH terpadu ini akan menjadi sentra pelayanan pemotongan yang mendukung ketersediaan daging aman,
--	---	------	---	---	-------------	---	------------------	---	-------------------	---	----------------	---	----------------	---	---------------	---



																sehat, utuh, dan halal (ASUH) untuk masyarakat Kota Balikpapan dan sekitarnya. Selanjutnya, pada tahun 2028, direncanakan pengadaan peralatan pendukung untuk mendukung operasionalisasi RPH terpadu tersebut. Peralatan meliputi mesin pemotong, meja stainless, alat stunning, timbangan digital, cold storage, hingga sistem pengolahan limbah ramah lingkungan.
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis (Satuan : %)	%	72	100	741.515.443	100	736.396.921	100	2.250.000.000	100	1.920.000.000	100	1.950.000.000	100	2.030.000.000	
Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				482.439.720		476.000.000		700.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000	

Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (laporan)	Lap ora n	1	4	482.439.720	5	476.000.000	5	700.000.000	5	800.000.000	5	800.000.000	5	800.000.000	Sub Kegiatan ini menjadi <b>pendukung utama layanan kesehatan hewan di Klinik Hewan DKP3</b> , yang berfungsi sebagai pusat <b>pelayanan vaksinasi, pengobatan, dan konsultasi</b> . Klinik hewan menjadi lini depan dalam deteksi dini, respon cepat kasus penyakit, serta edukasi kepada pemilik hewan terkait manajemen kesehatan dan pencegahan penyakit.
<i>Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium</i>				<i>0</i>		<i>0</i>		<i>800.000.000</i>		<i>300.000.000</i>		<i>300.000.000</i>		<i>350.000.000</i>	
Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Lap ora n	N/A	N/A	0	N/A	0	2	800.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	350.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium merupakan <b>sub kegiatan baru</b> yang dirancang untuk memperkuat sistem pengawasan kesehatan hewan dan keamanan produk hewan melalui pengembangan layanan laboratorium veteriner di kota Balikpapan. Sebagai langkah

																awal penguatan kapasitas laboratorium, pada tahun 2027 direncanakan pengadaan alat laboratorium yang difokuskan untuk menunjang kegiatan pengawasan. Pengadaan ini ditujukan agar laboratorium daerah mampu melakukan uji dasar secara mandiri dan mendukung percepatan respons terhadap temuan-temuan di lapangan.
Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 2. Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (unit usaha)				259.075.723		260.396.921		750.000.000		820.000.000		850.000.000		880.000.000	

Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	laporan	4	4	259.075.723	5	110.396.921	5	400.000.000	5	470.000.000	5	500.000.000	5	530.000.000	Sub Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pengawasan peredaran hewan saja tetapi juga mencakup rekomendasi atau perizinan berusaha terkait hewan sesuai kewenangannya yang dilaksanakan sebagai bagian dari penguatan tata kelola usaha pertanian yang legal, aman, dan sesuai standar teknis. Cakupan kegiatan meliputi Edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha peternakan, Pengawasan dan pengendalian atas penerbitan rekomendasi izin praktek dokter hewan, pendirian dan operasional klinik hewan, pet shop yang menjual obat hewan, serta usaha poultry atau distributor obat hewan, yang menjadi ruang lingkup pengawasan kewenangan daerah. Sub Kegiatan ini juga mencakup pengawasan terhadap mutu dan distribusi benih/bibit ternak, penjaminan penyediaan mutu
--	--	---------	---	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	--

																bibit ternak yang berkualitas (semen Beku), dukungan terhadap pengadaan Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan sarana pendukung lainnya. selain itu, juga mendukung pemberdayaan kelompok tani-ternak melalui bimbingan teknis dan fasilitasi sarana produksi, sehingga mampu memanfaatkan lahan pekarangan untuk kemandirian.
Sub Kegiatan Pembinaan Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	uni t usa ha	24	0	0	28	150.000.000	29	350.000.000	30	350.000.000	31	350.000.000	32	350.000.000	Sub Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin bahwa hewan hidup maupun produk asal hewan yang beredar di kota Balikpapan memenuhi standar keamanan pangan, kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet), dan kelayakan konsumsi. Salah satu fokus utama dalam kegiatan ini adalah pengambilan dan pengujian sampel produk asal hewan, baik di pasar tradisional, ritel modern, rumah potong hewan, maupun

																tempat distribusi lainnya. Jumlah sampel yang diuji setiap tahun menjadi indikator kinerja utama dalam menilai cakupan dan intensitas pengawasan. Pengujian dilakukan terhadap parameter-parameter seperti cemaran mikroba, residu obat hewan, formalin, boraks, serta kesegaran daging atau produk hasil ternak.
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Satuan : %)	%	52,65	55	227.076.610	55	100.000.000	60	450.000.000	60	500.000.000	60	550.000.000	60	600.000.000	
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	1. Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan2. Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				227.076.610		100.000.000		450.000.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000	

Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Hek tar	300	300	227.076.610	300	100.000.000	300	250.000.000	300	300.000.000	300	350.000.000	300	400.000.000	Sub Kegiatan ini Fokus pada <b>pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)</b> tanaman pangan seperti padi dan jagung, tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, dan sayur dataran rendah, serta komoditas perkebunan strategis seperti kelapa, sawit dan lada. Intervensi dilakukan secara berbasis lokasi dan komoditas, dengan memperhatikan dinamika iklim dan potensi penyebaran hama lintas wilayah. untuk mendukung kegiatan tersebut dibutuhkan : bahan kimia Gerdal OPT (Pestisida), Peralatan pengendali hama dan penyakit, Makan dan Minum Kegiatan, Uang Transpotasi Petani untuk pertemuan Gerdal, Belanja Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi dengan Provinsi dan Pusat
Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	Hek tar	N/A	N/A	0	N/A	0	30	200.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	Sub Kegiatan ini merupakan <b>sub kegiatan baru</b> yang bertujuan untuk

Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Perkebunan yang Ditangani																meningkatkan ketahanan pangan dari sektor pertanian terhadap risiko iklim ekstrem, seperti kekeringan, curah hujan tinggi, banjir, serta pergeseran pola musim tanam. Perubahan iklim telah terbukti berdampak nyata terhadap penurunan produktivitas tanaman, peningkatan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), dan gangguan siklus pertumbuhan komoditas strategis. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dibutuhkan : Belanja berupa Makan dan Minum Kegiatan, Uang Transportasi Petani, Honorarium dan Perjalanan Dinas Narasumber, Seminar Kit, Bantuan Bencana Pertanian (Sarana Produksi Pertanian), Belanja Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi dengan Provinsi dan Pusat
---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Masyarakat Penggiat Pertanian yang aktif (%)	%		2,80	707.202.300	5,50	988.878.910,00	4,10	450.000.000,00	4,10	1.300.000.000,00	4,10	1.300.000.000,00	4,10	600.000.000,00	
Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1. Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2. Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 3. Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				707.202.300		988.878.910		450.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		600.000.000	
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	6	3	204.903.750	6	75.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan ini sebelumnya dilakukan melalui fasilitasi pembentukan kelembagaan, pelatihan manajerial, serta peningkatan kapasitas organisasi kelompok tani dan Gapoktan. Namun, terhitung mulai tahun 2027 hingga 2030, sub kegiatan ini tidak lagi dilanjutkan dalam Rencana Strategis Dinas. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian fokus program, di mana kegiatan pemberdayaan petani secara teknis dan kelembagaan telah dialihkan dan diperkuat melalui mekanisme Sekolah Lapang

																(SL). Sekolah Lapang dinilai lebih efektif karena bersifat partisipatif, kontekstual, dan langsung berbasis pengalaman lapangan petani.
Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	2	2	454.987.775	2	793.878.910,00	2	250.000.000,00	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	300.000.000	Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat fungsi kelembagaan penyuluhan di Kota Balikpapan, khususnya dalam mendukung operasional Balai Penyuluh Pertanian (BPP) sebagai pusat layanan informasi, edukasi, dan diseminasi teknologi pertanian kepada petani. Dalam rangka penguatan fungsi demonstratif dan edukatif BPP, dialokasikan sarana produksi (saprodi) untuk kegiatan demplot pada dua BPP. Selain itu, sub kegiatan ini juga mendukung partisipasi daerah dalam ajang PEDANA (Pekan Daerah KTNA) dan PENAS (Pekan Nasional

[illegible]

Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	1	1	47.310.775	2	120.000.000,00	3	200.000.000,00	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	Sub kegiatan Sekolah Lapang (SL) merupakan pendekatan pembelajaran partisipatif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani dalam memahami, menerapkan, dan mengevaluasi teknologi pertanian secara langsung di lapangan. Melalui kegiatan ini, petani didorong untuk memperkuat pengetahuan teknis, mengembangkan kemampuan dalam pengambilan keputusan budidaya berbasis kondisi spesifik lokasi, serta mengadopsi praktik pertanian yang adaptif terhadap tantangan iklim dan lingkungan. Pelaksanaan Sekolah Lapang dilakukan secara reguler di lahan percontohan (demplot) dengan melibatkan 3 (tiga) kelompok tani yang berada dalam satu wilayah atau kawasan yang memiliki karakteristik agroekosistem serupa. Untuk mendukung
--	---	------	---	---	------------	---	----------------	---	----------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---

																efektivitas kegiatan, dialokasikan belanja berupa makan dan minum kegiatan, sarana produksi bagi sekolah lapang, uang transportasi peserta, honorarium narasumber, perlengkapan peserta seperti kaos lapangan dan seminar kit. Satuan Target Kinerja dari Sub Kegiatan ini adalah Unit dimana 1 Unit terdiri dari 3 Kelompok
NON URUSAN																
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	ang ka	77,54	74,00	22.037.905.515,5 0	77,54	21.696.930.09 3,50	78.13	24.254.029.61 2	79	24.890.732.5 72	80	25.635.955. 830	80.88	26.906.851. 413	

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah2. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD3. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD4. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD5. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD6. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah7. Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		0	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok um en	N/A	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	N/A	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	N/A	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	N/A	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	N/A	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	N/A	0	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan	Berita Acara	N/A	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN</b>				<b>17.467.765.897</b>		<b>16.500.000.000</b>		<b>17.000.000.000</b>		<b>17.500.000.000</b>		<b>18.000.000.000</b>		<b>18.500.000.000</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	73	100	17.467.765.897	105	16.500.000.000	110	17.000.000.000	115	17.500.000.000	120	18.000.000.000	120	18.500.000.000	

<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (pemagaran lahan aset)</b>				0		299.897.000		350.000.000		0		0		0	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	N/A	0	0	2	299.897.000	2	350.000.000	0	0	0	0	0	0	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1. Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 2. Jumlah yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>			N/A	0	1	0	1	200.000.000	1	336.500.000	1	200.000.000	1	350.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	174	0	0	0	0	0	0	105	136.500.000	0	0	105	150.000.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	N/A	0	0	0	0	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 5. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>				749.401.836		1.189.121.085		1.215.000.000		1.240.000.000		1.270.000.000		1.310.000.000	



Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	2	2	36.120.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	40.000.000	2	45.000.000	2	50.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	5	4	87.237.570	4	125.000.000	4	150.000.000	4	155.000.000	4	160.000.000	4	165.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	5	400.591.698	5	429.121.085	5	430.000.000	5	435.000.000	5	445.000.000	5	455.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1	34.838.055	1	100.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	113	120	190.614.512,5	120	500.000.000	120	525.000.000	120	530.000.000	120	535.000.000	120	550.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	0	0	0	0	2	30.000.000	2	35.000.000	2	40.000.000	2	45.000.000	
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1. Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4. Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan</b>				<b>341.901.983</b>		<b>484.906.014,00</b>		<b>1.099.568.890,00</b>		<b>1.204.525.778</b>		<b>1.319.978.356</b>		<b>1.446.976.192</b>	

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	N/A	0	0	6	99.300.000	6	378.400.000	6	416.240.000	6	457.864.000	6	503.650.400	
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	9	0	0	14	150.000.000	14	140.446.152	14	154.490.767	14	169.939.844	14	186.933.828	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	51	11	341.901.983	20	235.606.014	20	530.722.738	20	583.795.011	20	642.174.512	20	706.391.964	
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	N/A	0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</b>				<b>2.123.343.800</b>		<b>1.969.523.144</b>		<b>2.732.000.000</b>		<b>2.787.000.000</b>		<b>2.842.000.000</b>		<b>3.097.000.000</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	N/A	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	55	299.798.000	5	450.000.000	5	450.000.000	5	450.000.000	5	450.000.000	5	500.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	0	0	1	66.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap ora n	3	10	1.816.545.800	6	1.446.523.144	6	2.200.000.000	6	2.250.000.000	6	2.300.000.000	6	2.500.000.000	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4. Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 5. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</b>				<b>1.355.492.000</b>		<b>1.253.482.850,50</b>		<b>1.657.460.722</b>		<b>1.822.706.794</b>		<b>2.003.977.474</b>		<b>2.202.875.221</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	0	1	57.441.600	1	60.500.000	1	66.550.000	1	73.205.000	1	80.525.500	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	98	59	1.090.194.000	80	990.742.250,50	80	1.286.960.722	80	1.415.656.794	80	1.557.222.474	80	1.712.944.721	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	422	265.298.000	189	155.299.000	195	200.000.000	195	220.000.000	195	242.000.000	195	266.200.000	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	1	73.205.000	

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	N/A	0	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	
TOTAL							28.940.587.489		29.303.097.000		58.849.029.612		70.655.732.572		46.126.851.413	

**4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah**

Pelaksanaan sub kegiatan merupakan bentuk operasionalisasi dari program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Setiap sub kegiatan dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan dengan tetap memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat, potensi lokal, serta mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan arah kebijakan alokasi belanja daerah periode 2026–2030, Pemerintah Kota Balikpapan menetapkan sembilan program prioritas pembangunan daerah, yaitu:

- 1. Balikpapan Kota Inovatif dan Kreatif
- 2. Balikpapan Kota MICE dan Wisata
- 3. Balikpapan Kota Ramah Anak
- 4. Lingkungan Hidup dan Sosial yang Sehat dan Nyaman
- 5. Mengatasi Stunting
- 6. Pengendalian Banjir
- 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
- 8. Penyediaan Air Bersih yang Sehat dan Merata
- 9. Transformasi Birokrasi

Dari sembilan program prioritas tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Balikpapan mengampu salah satunya, yaitu Program Mengatasi Stunting. Peran DKP3 difokuskan pada penyediaan pangan bergizi, peningkatan ketersediaan protein hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH), serta edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA). Adapun sub kegiatan yang mendukung pencapaian program tersebut tersaji pada tabel berikut:

Tabel 11. Program Pendukung Prioritas

N o	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan (mendukung program prioritas Wali Kota)
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Kecukupan Konsumsi Energi Masyarakat	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Mengatasi stunting
2	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Mengatasi stunting

3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
			Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Mengatasi stunting
4	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya produk olahan perikanan	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
			Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Mengatasi stunting

**4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah**

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. IKU merupakan tolok ukur utama yang menggambarkan tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan mandat, tugas, dan fungsi yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Setiap IKU ditetapkan secara terukur, spesifik, relevan dengan kewenangan, serta dapat dipantau capaian kinerjanya setiap tahun. Melalui IKU, perangkat daerah dapat memastikan konsistensi antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan arah kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah.

Dalam periode perencanaan 2025–2029, target pencapaian IKU difokuskan pada upaya:

1. Menjamin keterkaitan antara program prioritas daerah dan kinerja perangkat daerah, sehingga setiap capaian program dapat terukur melalui indikator yang jelas.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja, dengan penyajian capaian target IKU sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis data.
3. Mengukur outcome yang memberi dampak langsung bagi masyarakat, seperti peningkatan ketahanan pangan, penurunan prevalensi stunting, peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, serta ketersediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).
4. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga keberadaan perangkat daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dengan demikian, pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025–2029 akan tercermin dalam capaian target IKU setiap tahunnya. IKU berperan penting tidak hanya sebagai alat ukur kinerja, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian, evaluasi, serta dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Tabel 12. Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET TAHUN						KE T																																												
			2025	2026	2027	2028	2029	2030																																													
Skor Pola Pangan Harapan (SKor PPH)	<p>Sumber data komponen perhitungan berdasarkan rilis BPS selanjutnya diolah oleh Dinas/PD Kota Balikpapan yang membidangi pangan</p> <p>Skor PPH dihitung berdasarkan komposisi konsumsi pangan menggunakan Angka Kecukupan Energi berdasarkan rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2018, yaitu 2.100 kkal/kap/hari. AKE di tingkat konsumsi adalah 2.150 kkal/kap/hari (berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 2018). Bobot kelompok pangan digunakan untuk perhitungan skor PPH. Skor maksimal diolah oleh GMSK-IPB dan Pusat Penganekaragaman Konsumsi Pangan, 2004. Skor PPH diperoleh dari perkalian %AKG dengan bobot, dibandingkan dengan skor maksimal. Skor PPH jika melebihi skor maksimal, skor PPH yang digunakan adalah skor maksimal.</p> <table><tr><th>No</th><th>Kelompok Pangan</th><th>Bobot</th><th>Skor Maksimal</th></tr><tr><td>1</td><td>Padi-padian</td><td>0,5</td><td>25</td></tr><tr><td>2</td><td>Umbi-umbian</td><td>0,5</td><td>2,5</td></tr><tr><td>3</td><td>Pangan hewani</td><td>2</td><td>24</td></tr><tr><td>4</td><td>Minyak dan lemak</td><td>0,5</td><td>5</td></tr><tr><td>5</td><td>Buah/biji berminyak</td><td>0,5</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>Kacang-kacangan</td><td>2</td><td>10</td></tr><tr><td>7</td><td>Gula</td><td>0,5</td><td>2,5</td></tr><tr><td>8</td><td>Sayur dan buah</td><td>5</td><td>30</td></tr><tr><td>9</td><td>Lain-lain</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah</td><td></td><td>100</td></tr></table>	No	Kelompok Pangan	Bobot	Skor Maksimal	1	Padi-padian	0,5	25	2	Umbi-umbian	0,5	2,5	3	Pangan hewani	2	24	4	Minyak dan lemak	0,5	5	5	Buah/biji berminyak	0,5	1	6	Kacang-kacangan	2	10	7	Gula	0,5	2,5	8	Sayur dan buah	5	30	9	Lain-lain	0	0		Jumlah		100	NILAI/SKOR	87,35	87,66	87,98	88,29	88,60	88,91	
No	Kelompok Pangan	Bobot	Skor Maksimal																																																		
1	Padi-padian	0,5	25																																																		
2	Umbi-umbian	0,5	2,5																																																		
3	Pangan hewani	2	24																																																		
4	Minyak dan lemak	0,5	5																																																		
5	Buah/biji berminyak	0,5	1																																																		
6	Kacang-kacangan	2	10																																																		
7	Gula	0,5	2,5																																																		
8	Sayur dan buah	5	30																																																		
9	Lain-lain	0	0																																																		
	Jumlah		100																																																		



Nilai AKIP Perangkat Daerah	diperoleh dari evaluasi internal yang dilakukan oleh inspektorat daerah (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Nilai Evaluasi AKIP = Nilai komponen perencanaan kinerja+ Nilai komponen pengukuran kinerja+ Nilai Komponen Pelaporan Kinerja+ Nilai Evaluasi Akuntabilitas	ANGKA	81,7 0	82,4 0	82,6	82,8	83	83,2	
-----------------------------	--	-------	-----------	-----------	------	------	----	------	--

#### 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025–2029 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara terukur. Pencapaian tersebut diwujudkan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi tolok ukur keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritas. Penyusunan IKK dilakukan secara selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah, sehingga mampu memberikan gambaran kinerja yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Adapun target kinerja IKK pada periode 2025–2029 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 13. Indikator Kinerja Kunci

N O	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGA N
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Tingkat Konsumsi Energi	%	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
2	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	14,7	13	12	10	9	8	
3	Persentase Pengawasan Jumlah Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan	%	84,00	84,67	85,33	86	86,67	87,33	

N O	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGA N
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	4.500	4.600	4.610	4.690	4.784	4.880	
5	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	312	319	320	327	333	340	
6	Volume Produksi Olahan Perikanan	Ton	0,00	0,00	1.130	1.132	1.134	1.136	
7	Persentase Jumlah masyarakat penggiat sektor pertanian yang mendapat Akses Bantuan sarana pertanian	%	26,00	26,50	27	27,50	28	28,50	
8	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/ha	8	8	9	9	10	10	
9	Persentase wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	55	55	60	60	60	60	
11	Persentase Kelompok Masyarakat Penggiat Pertanian yang aktif	%	2,80	5,50	4,10	4,10	4,10	4,10	
12	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	poin	74,00	77,54	78.13	79	80	80.88	

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 merupakan pedoman pembangunan jangka menengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan. Dokumen ini menegaskan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang disusun secara sistematis untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang tangguh, peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, serta pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha pangan secara berkelanjutan. Kesimpulan substansial dari penyusunan Renstra ini adalah adanya keselarasan antara kebijakan pusat, provinsi, dan daerah yang kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, serta indikator kinerja yang dapat diukur secara jelas. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi pedoman formal, tetapi juga instrumen strategis dalam mengintegrasikan berbagai kepentingan pembangunan lintas sektor dan memastikan bahwa pelayanan publik di bidang pangan, pertanian, dan perikanan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berdaya guna.

Pelaksanaan Renstra berlandaskan pada kaidah-kaidah perencanaan pembangunan daerah yang menekankan konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program. Setiap tahapan pembangunan tahunan dituangkan melalui penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) yang terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, pelaksanaan Renstra akan bergerak secara bertahap, terukur, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis, baik yang bersifat lokal, regional, maupun nasional. Prinsip kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, hingga masyarakat, menjadi landasan dalam mendukung keberhasilan implementasi program dan kegiatan.

Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Monitoring dilaksanakan secara berkala melalui pengumpulan dan analisis data capaian indikator kinerja, sedangkan evaluasi dilakukan baik pada akhir tahun anggaran, pertengahan periode, maupun pada akhir periode Renstra. Evaluasi ini diarahkan untuk menilai tingkat efektivitas, efisiensi, serta keberlanjutan dari setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan. Seluruh hasil monitoring dan evaluasi menjadi instrumen penting dalam penyusunan laporan kinerja (LKjIP) dan menjadi dasar perbaikan perencanaan, penganggaran, serta pengambilan keputusan di periode berikutnya.

Dengan penerapan SAKIP, pelaksanaan Renstra DKP3 tidak hanya difokuskan pada realisasi anggaran dan output kegiatan, melainkan juga diarahkan pada pencapaian outcome yang berdampak nyata bagi peningkatan ketahanan pangan, kesejahteraan petani, nelayan, dan pembudidaya ikan, serta terpenuhinya hak masyarakat atas pangan yang cukup, aman, bergizi, dan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan memperkuat akuntabilitas dan transparansi kinerja perangkat daerah sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menyongsong periode pembangunan lima tahun mendatang, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029. Rencana Strategis merupakan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Dinas Perdagangan Kota Balikpapan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Balikpapan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan tugas pembantuan sesuai ketentuan perundang-undangan sesuai Peraturan Walikota Balikpapan tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renstra OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman dan panduan OPD dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan setiap tahunnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renstra yang dilakukan adalah sebagai berikut :

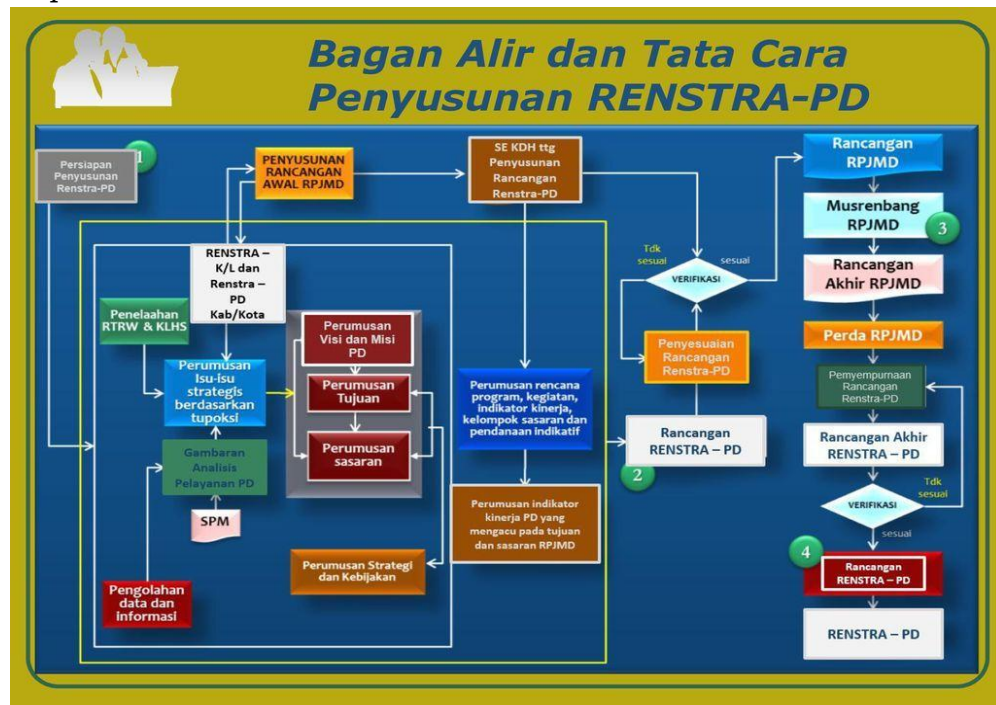
#### 1. Persiapan Penyusunan Renstra

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

#### 2. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis, resume/notulen- notulen rapat, bahan paparan (*slide* atau *white paper*), hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renstra.

3. Tahap Perumusan Rancangan Renstra
4. Penyajian dan penyampaian rancangan Renstra
5. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
6. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renstra yang mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD
7. Penetapan Renstra



Gambar 1.1  
Bagan Alur Rancangan Renstra

## 1.2 Landasan Hukum

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan tahun 2025-2029 Kota Balikpapan berlandaskan hukum perundang-undangan dan peraturan yang berlaku sebagai berikut :

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan tahun 2025-2029 Kota Balikpapan berlandaskan hukum perundang-undangan dan peraturan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen
11. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

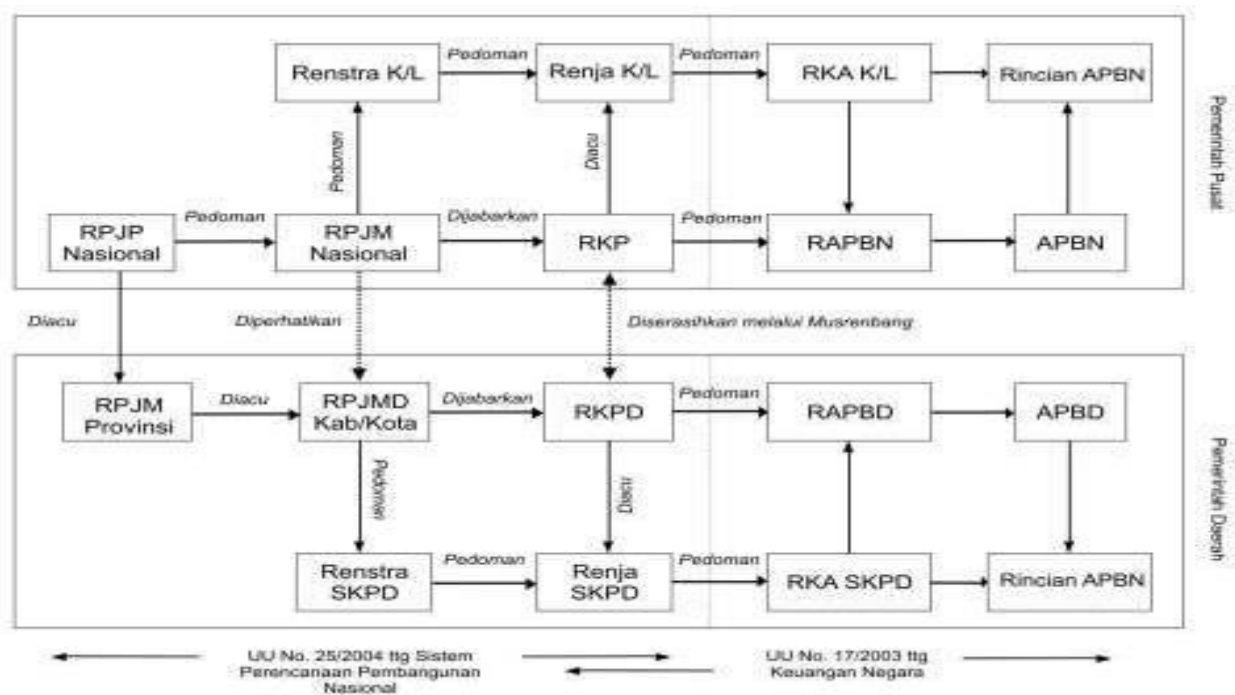
- 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
  20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern;
  21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  23. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/3/2017 Tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  26. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
  27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

- Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 28. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 54);
  - 29. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2045.
  - 30. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2025-2029
  - 31. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja perangkat daerah.

1.3 Keterkaitan Antara Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Perencanaan Daerah disusun berdasarkan data serta aturan yang mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, aspek kesejahteraan, pelayanan serta data dan informasi yang dimuat dalam dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Selain berpedoman pada Permendagri No. 86 Tahun 2017, secara substansi Renstra Dinas Perdagangan mengacu kepada kebijakan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029, Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, serta dokumen perencanaan lainnya yang relevan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (baik jangka panjang, menengah dan tahunan) sehingga akan menjadi dokumen perencanaan publik yang akuntabel, realible dan implementatif, gambaran keterkaitan dokumen seperti gambar 1.2 di bawah:

Gambar 1.3



Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Penganggaran

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Perdagangan Kota Balikpapan dalam perencanaan 5 (lima) tahun dan sebagai dasar rencana kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu.

Berdasarkan maksud tersebut Rencana Strategis Dinas Perdagangan memiliki tujuan mengoptimalkan peran perencanaan pembangunan dalam pencapaian melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Balikpapan yang tercantum di dalam RPJMD Kota Balikpapan 2025-2029, sehingga terjadi sinergitas tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dengan urusan perencanaan dalam RPJMD Kota Balikpapan

1.5 Sistematika Penulisan

<b>BAB I.</b>	<b>PENDAHULUAN</b>  Memuat informasi terkait latar belakang penyusunan Renstra, dasar hukum yang relevan dan signifikan, Keterkaitan Antara Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra, dan sistematika penulisan
<b>BAB II.</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>  Memuat tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah; sumber daya perangkat daerah; kinerja penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah; kelompok sasaran pelayanan perangkat daerah.  Memuat data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020-2024 dan data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.  Memuat hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah selama 5 (lima) tahun terakhir yang berkaitan dengan capaian IKU dan IKK.  Memuat permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah, serta memuat isu strategis sesuai lingkungan dinamis yang dapat mempengaruhi perangkat daerah baik langsung maupun tidak langsung.
<b>BAB III.</b>	<b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>  Memuat tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada NSPK (norma, standar, prosedur dan kriteria) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029.  Pada bagian ini dikemukakan juga rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, Selain itu, subbab ini memuat penahanan



	pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.
<b>BAB IV</b>	<p><b>PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b></p> <p>Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, <i>outcome</i> dan <i>output</i> yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.</p> <p>Memuat penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU berlaku dari tahun dari tahun 2025 hingga 2030.</p> <p>Memuat penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK berlaku dari tahun dari tahun 2025 hingga 2030.</p>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN KOTA BALIKPAPAN**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan**

Gambaran pelayanan perangkat daerah merupakan deskripsi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat maupun antar lembaga pemerintahan.

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Pembentukan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Tipe B yang berfungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja perangkat daerah, Dinas Perdagangan memiliki uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Perdagangan melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan di bidang perdagangan;
- c. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan perdagangan;
- d. pengaturan, perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian teknis di bidang perdagangan;
- e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi penyelenggaraan urusan perdagangan;
- f. pelaksanaan peningkatan sarana distribusi perdagangan;
- g. pelaksanaan kerja sama, penggunaan dan pemasaran serta promosi perdagangan;
- h. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengendalian pemberian layanan perizinan urusan perdagangan;
- i. pelaksanaan stabilitasi harga barang/kebutuhan pokok dan barang penting tingkat Daerah;
- j. pengoordinasian pemberdayaan dan pengembangan urusan perdagangan;
- k. pengelolaan UPTD;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian:

- a. perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
- b. administrasi keuangan;
- c. administrasi barang milik Daerah pada Dinas;

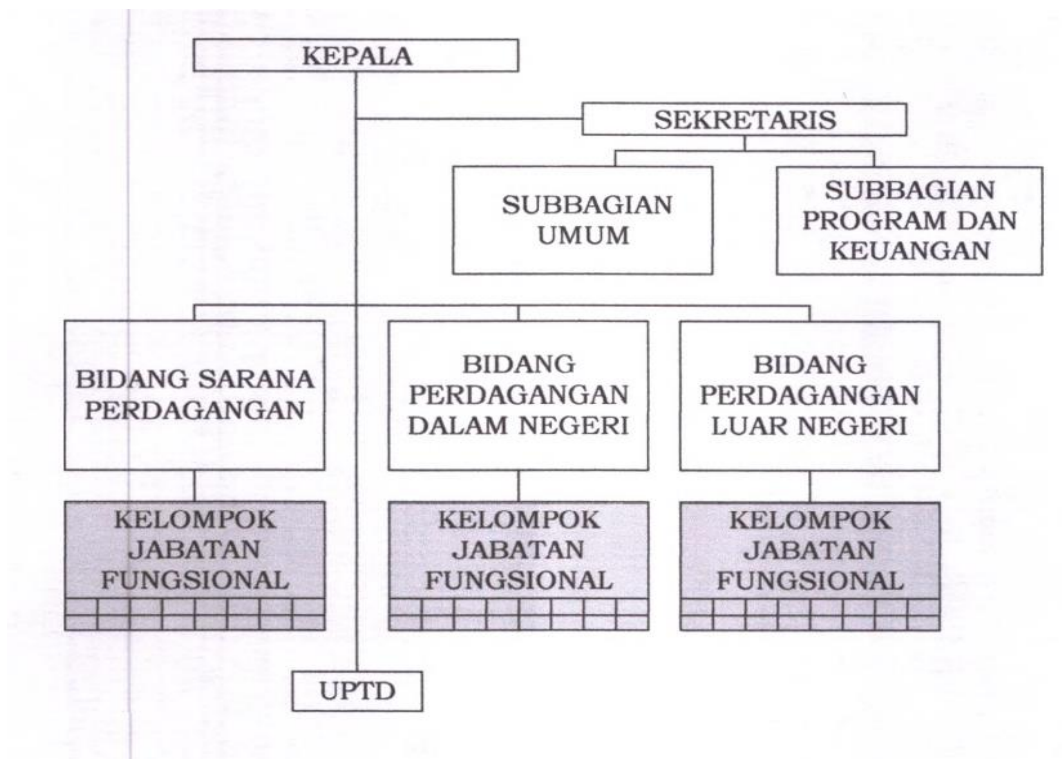
- d. administrasi kepegawaian;
- e. administrasi umum;
- f. pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah;
- g. pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah;
- h. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah;
- i. layanan informasi dan pengaduan; dan
- j. pembinaan pelayanan publik.

Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
  - b. pengoordinasian penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah;
  - c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
  - d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
  - e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
  - f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
  - g. pengelolaan anggaran Dinas dan penerimaan Dinas;
  - h. pelaksanaan administrasi keuangan;
  - i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - j. pembinaan dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik;
  - k. pengelolaan survei kepuasan masyarakat;
  - l. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - m. pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksana;
  - n. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
  - o. pengoordinasian bidang dan UPTD;
  - p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  - q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Sarana Perdagangan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan Bidang Sarana Perdagangan. Bidang Sarana Perdagangan melaksanakan fungsi:
- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Sarana Perdagangan;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan, pengelolaan, pembinaan, pemberdayaan, sarana perdagangan;
  - c. pelaksanaan pengelolaan, penyediaan, pembinaan dan pemberdayaan sarana perdagangan rakyat, potensi pasar rakyat dan sarana perdagangan induk;
  - d. perencanaan penataan dan penyediaan sarana lokasi pedagang informal yang terlokalisasi;
  - e. pelaksanaan penyediaan sarana perdagangan;
  - f. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan sarana perdagangan;
  - g. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan penataan pasar tumbuh, pedagang informal yang terlokalisasi;

- h. perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana perdagangan milik Pemerintah Daerah;
  - i. pembinaan dan pengendalian, evaluasi dan pemantauan pemanfaatan sarana perdagangan milik Pemerintah Daerah;
  - j. pembinaan dan pengendalian, evaluasi dan pemantauan pemanfaatan sarana perdagangan;
  - k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis terhadap pengelola sarana perdagangan;
  - l. penerbitan, pengawasan dan pengendalian tata kelola administrasi penyewaan tempat berjualan pada pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
  - m. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi prasarana dan sarana, kebersihan, ketenteraman dan ketertiban pasar rakyat yang dikelola Pemerintah Daerah;
  - n. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD pengelola pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan
  - o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  - p. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perdagangan Dalam Negeri. Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang perdagangan dalam negeri;
  - b. penyusunan petunjuk teknis di bidang perdagangan dalam negeri;
  - c. perumusan bahan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perdagangan dalam negeri;
  - d. pengendalian dan pengawasan penerbitan izin pengelolaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
  - e. penyusunan regulasi dan tata laksana penerbitan izin pengelolaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
  - f. pembinaan pengelolaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
  - g. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kelembagaan usaha, perdagangan jasa, keagenan dan pendaftaran perusahaan;
  - h. penyusunan regulasi dan tata laksana penerbitan tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang;
  - i. pengendalian dan pengawasan penerbitan tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang;
  - j. penyusunan regulasi dan tata laksana proses penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba;
  - k. pengawasan dan pengendalian penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba;
  - l. penyusunan regulasi dan tata laksana penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C;
  - m. pengawasan dan pengendalian penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C;
  - n. pelaksanaan koordinasi pengawasan tempat penyimpanan bahan berbahaya dengan instansi teknis terkait;

- o. penyusunan bahan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi;
  - p. pelaksanaan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi;
  - q. pengoordinasian dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida, produsen, distributor, dan pengecer di tingkat Daerah;
  - r. pengoordinasian keterjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
  - s. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan konsumen dan tertib niaga;
  - t. perumusan kebijakan tata kelola metrologi legal;
  - u. pengoordinasian pelaksanaan metrologi legal;
  - v. pelaksanaan kerja sama pemasaran, misi dagang, kontak dagang, pameran promosi peningkatan akses pasar, fasilitasi dan kerja sama kemitraan (khusus pelaku mikro kecil menengah sektor perdagangan);
  - w. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD metrologi legal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
  - x. pelaksanaan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Daerah;
  - y. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  - z. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perdagangan Luar Negeri. Bidang Perdagangan Luar Negeri melaksanakan fungsi:
- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Perdagangan Luar Negeri;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan luar negeri;
  - c. penyelenggaraan pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor Daerah;
  - d. partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor Daerah;
  - e. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang serta produk ekspor unggulan Daerah;
  - f. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor;
  - g. penerbitan surat keterangan asal;
  - h. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
  - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Balikpapan**

**2.1.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan Kota Balikpapan**

Dinas Perdagangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya menggunakan sumber daya yang mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional berdasarkan uraian dibawah ini.

**1. Sumber daya manusia**

Dalam usaha pencapaian kinerja berdasarkan tugas dan fungsi OPD Dinas Perdagangan ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki pendidikan dan kompetensi memadai. Hal ini terdeskripsi sebagai berikut.

**Tabel 2.1.2.1**  
**Data Pegawai ASN berdasarkan tingkat pendidikan**  
**Per 20 Agustus 2025**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1.	SD	1	1,43
2.	SMP	3	4,29
3.	SLTA/se-derajat	21	30,00
4.	Sarjana Muda/D3	11	15,71
5.	D4/Sarjana (S1)	28	40,00
6.	Pasca Sarjana (S2)	6	8,57
Jumlah		70	100,00

**Tabel 2.1.2.2**  
**Data Pegawai NON ASN**  
**Tenaga bantu administrasi dan reparatir**  
**berdasarkan tingkat pendidikan**  
**Per 20 Agustus 2025**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	S1	1	50,00
2	SLTA	1	50,00
Jumlah		2	100,00

**Tabel 2.1.2.3**  
**Data pegawai berdasarkan golongan**

No.	Golongan	Jumlah	%
1	II	10	13,89
2	III	38	52,78
3	IV	5	6,94
4	PPPK	17	23,61
5	Tenaga bantu	2	2,78
Jumlah		72	100,00

**Tabel 2.1.2.4**  
**Data pegawai berdasarkan eselon**

No.	Eselon	Jumlah	%
1.	II	1	1,39
2.	III	4	5,56
3.	IV	11	15,28
4	Non eselon	56	77,78
Jumlah		72	22,22

**Tabel 2.1.2.5**  
**Data pegawai ASN berdasarkan jenis kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1.	Laki – laki	35	50,00
2.	Perempuan	35	50,00
Jumlah		70	100,00

**Tabel 2.1.2.6**  
**Data pegawai NON ASN berdasarkan jenis kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1.	Laki – laki	1	50,00
2.	Perempuan	1	50,00
Jumlah		2	100,00



2. **Sarana dan Prasarana**

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan Kota Balikpapan dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.1.2.7**  
**Sarana dan Prasarana Per Juli 2025**  
**Kota Balikpapan**

Nama Sarana/Prasarana		Quantity		Keterangan
1	Tanah bangunan kantor Dinas	1.415	M <sup>2</sup>	Jl. R.E Martadinata
2	Tanah Bangunan Inpres Kebun sayur	2.795	M <sup>2</sup>	Jl. Letjentd, Soeprapto Kel. Marga Sari KecBalikpapan Barat
3	Tanah bangunan pasar Kp. Baru Tengah	1.548	M <sup>2</sup>	Jl, Letjend. Suprapto Kel. Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat
4	Tanah Bangunan Pandan Sari	15.710	M <sup>2</sup>	Jl. Pandan Wangi, Kel.Marga Sari Kec Balikpapan Barat
5	Tanah Bangunan Pasar Sepinggan	12.637	M <sup>2</sup>	Jl.Sepingan kelurahan Sepinggan Kec Balikpapan Selatan
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	695	M <sup>2</sup>	Jl.Jendral Sudirman (Kantor Eks Lurah Klandasan Ulu Lama
7	Tanah bangunan pasar Batu Ampar ( Eks Pasar Ban)	1.014	M <sup>2</sup>	Jln. Komplek Perumahan Sosial Jalan Patimura Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara

Sumber data : Dinas Perdagangan Kota Balikpapan

Nama Sarana/Prasarana		Quantity		Keterangan
	Peralatan dan Mesin			
1	Kendaraan Roda 4	13	Unit	Kendaraan Operasional Roda 4 Kantor Dinas Perdagangan
2	Kendaraan Roda 2	20	Unit	Kendaraan Operasional Roda 2 Kantor Dinas Perdagangan
3	Mesin Absensi	6	Unit	
4	Ac Split	38	Unit	
5	Pc Unit	38	Unit	
6	Notebook/Laptop	12	Unit	
7	Printer	48	Unit	
8	Unintemputible Power Suplly (UPS)	26	Unit	
9	Electric Generating Set	2	Unit	
10	Gerobak Dorong	14	Unit	
11	Gerobak Tarik	31	Unit	
12	Meja Biro	10	Unit	
13	Meja tulis	18	Unit	
14	Meja Rapat	12	Unit	
15	Meja Komputer	9	Unit	
16	Meja Kerja II,III,IV	31	Unit	
17	Kursi Putar	24	Unit	
18	Kursi Rapat	50	Unit	
19	Kursi Kerja II,III,IV	31	Unit	
20	Kursi Tamu II,III,IV	6	Unit	
21	Kursi Lipat	60	Unit	
22	Kursi Besi/Metal	8	Unit	
23	Mesin Potong Rumput	2	Unit	
24	Rak Besi/Metal	38	Unit	
25	Band Kas	2	Unit	
26	Kaca Hias	1	Unit	
27	Facsimile	1	Unit	
28	Jangka	1	Unit	
29	Rak kayu	2	Unit	
33	Lemari Kaca	1	Unit	
35	Lemari Es	2	Unit	
36	Kipas Angin	3	Unit	
38	Alat Ukur Lainnya ( lain-Lain)	1	Unit	
39	Tripod Camera	1	Unit	
40	Megaphone	4	Unit	
41	Handy Talky	3	Unit	
42	Wirelles Amplifier	1	Unit	
43	Telephone ( PABX )	1	Unit	
44	Proyektor + Attachment	1	Unit	
45	Timbangan Pegas Kapasitas 25 KG	1	Unit	
46	Anak Timbangan Gram Standar 1 Gram	1	Unit	
47	Timbangan Elektronik	1	Unit	
48	Alat Pembersih Lain-Lain(lokal/-)	13	Unit	
49	Alat Pembersih Lain-Lain(Drum/Sampah)	17	Unit	
50	Alat Pembersih Lain-Lain(-/Container)	2	Unit	
51	Alat Pembersih Lain-Lain( Krisbow/Beroda)	4	Unit	
52	Alat Pencacah Hijauan	2	Unit	
53	Papan Nama Istansi	5	Unit	

Nama Sarana/Prasarana		Quantity		Keterangan
54	Televisi	1	Unit	
55	Sound SyStem	2	Unit	
56	Lift	1	Unit	
57	Gorden	4	Unit	
58	Alat Rumah Tangga Lain-Lainnya (Aladin/Ambal)	1	Unit	
59	Papan Visual	1	Unit	
60	CopyBoard/Elektrik White Board	2	Unit	
61	Alat Hiasan	1	Unit	
62	Tangga Alumunium	3	Unit	
63	Dispenser	4	Unit	
64	Handy Cam	2	Unit	
65	Digital Camera	2	Unit	
66	Bejana Ukur	1	Unit	
67	Tiang Bendera	1	Unit	
68	Alat Penghancur Kertas	1	Unit	
69	Mesin Pompa Air	1	Unit	
71	Transformator	1	Unit	
72	Circuit Closed Televesion(CCTV)	1	Unit	
73	Deal Thickness Gauge	1	Unit	
74	Server	1	Unit	

Sumber data : Dinas Perdagangan Kota Balikpapan

Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan terdiri dari aset tetap (*fixed asset*) baik aset berwujud (*tangible*) dan aset tidak berwujud (*intangible*) yang dirincikan sebagai berikut :

A. ASET BERWUJUD

1. Lahan dan Bangunan Kantor

Bangunan Kantor Dinas Perdagangan merupakan aset yang tercatat sebagai aset tetap. Selain bangunan kantor terdapat pula UPTD yang merupakan bagian bangunan kantor OPD pelayanan dari Dinas Pasar. Jumlah UPTD pelayanan yang dimiliki sejumlah 4 buah yaitu UPTD Wilayah I, UPTD Wilayah II, UPTD Wilayah III, dan UPTD Wilayah IV dan UPT Metrologi. Berdasarkan pencatatan aset bangunan akhir tahun pelaksanaan Renstra 2021-2026 terdeskripsi sebagai berikut :

- a) Bangunan Kantor Dinas Perdagangan didirikan pada tahun 1990 dengan sumber dana pembangunan APBD Kota Balikpapan Tahun 1989 dengan luas bangunan 1.415.m<sup>2</sup> dengan luasan lahan 1.415 m<sup>2</sup>.. Kondisi bangun dalam keadaan 85% baik.
- b) Bangunan Kantor UPTD Wilayah I Kampung Baru Tengah mulai beroperasi pada tahun 2006 dan Pasar Loak Besi pada tahun 2009 .dengan luasan lahan 1.153.90.. m<sup>2</sup>. Kondisi bangunan dalam keadaan .80.% baik, Pasar Inpres Kebun Sayur mulai beroperasi pada tahun 1981 dan Penampungan A dengan luas lahan 1.529.108 m<sup>2</sup>
- c) Bangunan Kantor UPTD Wilayah II didirikan pada tahun .2008 sumber dana pembangunan APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran

.2008 dengan luas bangunan 15.580 m<sup>2</sup>. dan luasan lahan 15.710 m<sup>2</sup>. Kondisi bangun dalam keadaan 80.% baik

- d) Bangunan Kantor UPTD Wilayah III didirikan pada tahun 1986. dengan sumber dana pembangunan APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 1985 dengan luasan lahan 3.236 m<sup>2</sup>. Kondisi bangun dalam keadaan 80% baik, Pasar Damai mulai beroperasi pada tahun 1986 dengan luasan lahan 3.300 m<sup>2</sup>. Kondisi bangun dalam keadaan 80% baik
- e) Bangunan Kantor UPTD Wilayah IV Pasar Sepinggian mulai beroperasi pada tahun 1989 dengan sumber dana pembangunan APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 1988 dengan luasan lahan 9.025 m<sup>2</sup>. Kondisi bangunan dalam keadaan 89% baik
- f) Bangunan kantor UPT Metrologi mulai beroperasi pada tahun 2015 dengan sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan Provinsi dan APBD Kota Balikpapan dengan luas bangunan 498,90 m<sup>2</sup>. dengan luas areal parkir 438m<sup>2</sup> Kondisi bangunan dalam keadaan baik 100%
- g) Bangunan Tangki Ukur Mobil yang baru diresmikan pada tahun 2016 dengan luas bangunan 242 m<sup>2</sup> dengan luas areal parkir 360 m<sup>2</sup>

## 2. Bangunan Pasar

Kota Balikpapan memiliki jumlah pasar sebanyak 9 pasar yang tersebar di Balikpapan Barat, Balikpapan Selatan, Balikpapan Kota dan Balikpapan Timur. Pasar merupakan aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai fasilitas umum bagi masyarakat kota. Pasar yang menjadi aset kota :

- a) Pasar Kampung Baru Tengah. Pasar ini didirikan pada tahun 2008 dengan luasan bangunan pasar 1204 m<sup>2</sup> diatas lahan dengan luasan 3.376 m<sup>2</sup>. Jumlah lapak pedagang 356 unit. Fasilitas umum yang tersedia : Parkir, TPS, MCK dan Tempat Ibadah.
- b) Pasar Inpres Kebun Sayur. Pasar ini didirikan pada tahun 1981 dengan luasan bangunan pasar 2.677 m<sup>2</sup> diatas lahan dengan luasan 11.882 m<sup>2</sup>. Jumlah lapak pedagang 343 unit. Fasilitas umum yang tersedia : Parkir, TPS, MCK dan Tempat Ibadah.
- c) Pasar Pandan Sari. Pasar ini didirikan pada tahun 1982 dengan luasan bangunan pasar 4.136 m<sup>2</sup> diatas lahan dengan luasan 9.102 m<sup>2</sup>. Jumlah lapak pedagang 578 unit. Fasilitas umum yang tersedia : Parkir, TPS, MCK dan Tempat Ibadah.
- d) Pasar Inpres Klandasan.I dan II Pasar ini didirikan pada tahun 1986 dengan luasan. lahan.3.236. m<sup>2</sup>. Jumlah lapak pedagang ..974 unit. Fasilitas umum yang tersedia : Parkir, TPS, MCK dan Tempat Ibadah.
- e) Pasar Damai Balikpapan Permai. Pasar ini didirikan pada tahun 1989 dengan luasan bangunan pasar 3.464 m<sup>2</sup> diatas lahan dengan luasan 3500 m<sup>2</sup>. Jumlah lapak pedagang 294 unit. Fasilitas umum yang tersedia : Parkir, TPS, dan MCK.
- f) Pasar Sepinggian. Pasar ini didirikan pada tahun 1985 dengan luasan bangunan pasar 9.025 m<sup>2</sup> diatas lahan dengan luasan 12.637 m<sup>2</sup>. Jumlah lapak pedagang 833 unit. Fasilitas umum yang tersedia : Parkir, TPS, MCK dan Tempat Ibadah.
- g) Pasar Teritip. Pasar ini didirikan pada tahun 2013 dengan sumber pendanaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Luasan bangunan pasar 1.128,60 m<sup>2</sup> diatas lahan dengan luasan 9.929 m<sup>2</sup>.

Jumlah lapak pedagang 96 unit. Fasilitas umum yang tersedia : Parkir, TPS, MCK dan Tempat Ibadah.

3. Prasarana

Berdasarkan inventarisasi yang tercatat oleh Dinas Perdagangan, prasarana yang merupakan aset tetap sebagai berikut :

a. **Prasarana Bangunan Kantor OPD Dinas Perdagangan**

1. Akses jalan kantor. Kantor OPD Dinas Perdagangan memiliki akses jalan pada kantor dengan panjang 12 m
2. Pagar bangunan kantor. Kantor OPD Dinas Perdagangan memiliki pagar kantor dengan panjang keliling 1.560 m'
3. Halaman kantor. Kantor OPD Dinas Perdagangan memiliki halaman kantor dengan luas 1.415 m<sup>2</sup>.
4. Parkiran. Kantor OPD Dinas Perdagangan memiliki area parkir dengan luas 1.415 m<sup>2</sup>.
5. Lapangan olahraga. Kantor OPD Dinas Perdagangan belum memiliki lapangan olahraga.
6. Taman. Kantor OPD Dinas Perdagangan memiliki belum memiliki taman olahraga.
7. Muster point. Kantor OPD Dinas Perdagangan belum memiliki area muster point.
8. Lampu penerangan jalan dan kantor. Disekitar Kantor OPD Dinas Perdagangan terdapat penerangan jalan dan kantor sejumlah 4 titik.
9. Bangunan serba guna / balai pertemuan. Kantor OPD Dinas Perdagangan memiliki balai pertemuan terbuka dengan luas 145 m<sup>2</sup>
10. Gudang. Kantor OPD Dinas Perdagangan belum memiliki bangunan gudang.
11. Jaringan telekomunikasi. Kantor OPD Dinas Perdagangan memiliki jaringan telekomunikasi berupa telepon kantor dan internet.
12. Jaringan air bersih. Kantor OPD Dinas Perdagangan memiliki jaringan air bersih yang terpasang pada bangunan.
13. Jaringan listrik. Kantor OPD Dinas Perdagangan memiliki jaringan instalasi listrik yang terpasang pada bangunan.

b. **Prasarana Bangunan Kantor UPTD OPD Dinas Perdagangan**

1. Prasarana Bangunan Kantor UPTD Wilayah I Pasar Inpres Kebun Sayur
  - a. Akses jalan kantor UPTD Wilayah I. Kantor UPTD Wilayah I memiliki akses jalan pada kantor dengan panjang 24 m'
  - b. Pagar bangunan kantor UPTD Wilayah I. Kantor UPTD Wilayah I memiliki pagar kantor dengan panjang keliling 35 m'
  - c. Lapangan olahraga UPTD Wilayah I. Kantor UPTD Wilayah I belum memiliki lapangan olahraga.
  - d. Taman UPTD Wilayah I. Kantor UPTD Wilayah I memiliki area taman dengan luas 1.600 m<sup>2</sup>.
  - e. Muster point UPTD Wilayah I. Kantor UPTD Wilayah I belum memiliki area muster point. Lampu penerangan jalan dan kantor UPTD Wilayah I. Disekitar Kantor UPTD Wilayah I terdapat penerangan jalan dan kantor sejumlah 11 titik
  - f. Bangunan serbaguna/balai pertemuan UPTD Wilayah I Kantor UPTD Wilayah I belum memiliki balai pertemuan terbuka.

- g. Gudang UPTD Wilayah I. Kantor UPTD Wilayah I belum memiliki bangunan gudang.
  - h. Jaringan telekomunikasi. Kantor UPTD Wilayah I memiliki jaringan telekomunikasi berupa telepon kantor dan internet.
  - i. Jaringan air bersih. Kantor UPTD Wilayah I memiliki jaringan air bersih yang terpasang pada bangunan.
  - j. Jaringan listrik. Kantor UPTD Wilayah I memiliki jaringan instalasi listrik yang terpasang pada bangunan.
2. Prasarana Bangunan Kantor UPTD Wilayah II Pasar Pandansari
- a. Akses jalan kantor UPTD Wilayah II. Kantor UPTD Wilayah II memiliki akses jalan pada kantor dengan panjang 20 m’
  - b. Pagar bangunan kantor UPTD Wilayah II. Kantor UPTD Wilayah II memiliki pagar kantor dengan panjang keliling 35 m2.
  - c. Halaman kantor UPTD Wilayah II. Kantor UPTD Wilayah II memiliki halaman kantor dengan luas 24 m2.
  - d. Parkiran UPTD Wilayah II. Kantor UPTD Wilayah II memiliki area parkir dengan luas 6.000 m2.
  - e. Lapangan olahraga UPTD Wilayah II. Kantor UPTD Wilayah II belum memiliki lapangan olahraga.
  - f. Taman UPTD Wilayah II. Kantor UPTD Wilayah II memiliki area parkir dengan luas 25 m2.
  - g. Muster point UPTD Wilayah II. Kantor UPTD Wilayah II belum memiliki area muster point.
  - h. Lampu penerangan jalan dan kantor UPTD Wilayah II. Disekitar Kantor UPTD Wilayah II terdapat penerangan jalan dan kantor sejumlah 21 titik.
  - i. Bangunan serbaguna/balai pertemuan UPTD Wilayah II. Kantor UPTD Wilayah II memiliki balai pertemuan terbuka dengan luas 32 m2.
  - j. Gudang UPTD Wilayah II. Kantor UPTD Wilayah II belum memiliki bangunan gudang.
  - k. Jaringan telekomunikasi. Kantor UPTD Wilayah II memiliki jaringan telekomunikasi berupa telepon kantor dan internet.
  - l. Jaringan air bersih. Kantor UPTD Wilayah II memiliki jaringan air bersih yang terpasang pada bangunan.
  - m. Jaringan listrik. Kantor UPTD Wilayah II memiliki jaringan instalasi listrik yang terpasang pada bangunan.
3. Prasarana Bangunan Kantor UPTD Wilayah III Pasar Klandasan dan Damai
- a. Akses jalan kantor UPTD Wilayah III. Kantor UPTD Wilayah III memiliki akses jalan pada kantor dengan panjang 100 m
  - b. Parkiran UPTD Wilayah III. Kantor UPTD Wilayah III memiliki area parkir dengan luas 2.500 m2.
  - c. Lapangan olahraga UPTD Wilayah III. Kantor UPTD Wilayah III belum memiliki lapangan olahraga.
  - d. Taman UPTD Wilayah III. Kantor UPTD Wilayah III memiliki Taman dengan luas 1000 m2.
  - e. Muster point UPTD Wilayah III. Kantor UPTD Wilayah III belum memiliki area muster point.
  - f. Lampu penerangan jalan dan kantor UPTD Wilayah III. Disekitar Kantor UPTD Wilayah III terdapat penerangan jalan dan kantor sejumlah 8 titik.

- g. Gudang UPTD Wilayah III. Kantor UPTD Wilayah III memiliki bangunan gudang dan gudang kompos.
  - h. Jaringan telekomunikasi. Kantor UPTD Wilayah III memiliki jaringan telekomunikasi berupa telepon kantor dan internet.
  - i. Jaringan air bersih. Kantor UPTD Wilayah III memiliki jaringan air bersih yang terpasang pada bangunan.
  - j. Jaringan listrik. Kantor UPTD Wilayah III memiliki jaringan instalasi listrik yang terpasang pada bangunan.
4. Prasarana Bangunan Kantor UPTD Wilayah IV Pasar Sepinggan
- a. Akses jalan kantor UPTD Wilayah IV. Kantor UPTD Wilayah IV memiliki akses jalan pada kantor dengan panjang 35 m'
  - b. Pagar bangunan kantor UPTD Wilayah IV. Kantor UPTD Wilayah IV tidak memiliki pagar kantor.
  - c. Halaman kantor UPTD Wilayah IV. Kantor UPTD Wilayah IV memiliki halaman kantor dengan luas 800 m<sup>2</sup>
  - d. Parkiran UPTD Wilayah IV. Kantor UPTD Wilayah IV memiliki area parkir dengan luas 800 m<sup>2</sup>.
  - e. Lapangan olahraga UPTD Wilayah IV. Kantor UPTD Wilayah IV belum memiliki lapangan olahraga.
  - f. Taman UPTD Wilayah IV. Kantor UPTD Wilayah IV memiliki area parkir dengan luas.800 m<sup>2</sup>.
  - g. Muster point UPTD Wilayah IV. Kantor UPTD Wilayah IV belum memiliki area muster point.
  - h. Lampu penerangan jalan dan kantor UPTD Wilayah IV. Disekitar Kantor UPTD Wilayah IV terdapat penerangan jalan dan kantor sejumlah 2 titik.
  - i. Bangunan serbaguna/balai pertemuan UPTD Wilayah IV. Kantor UPTD Wilayah IV memiliki balai pertemuan terbuka dengan luas.800 m
  - j. Gudang UPTD Wilayah IV. Kantor UPTD Wilayah IV memiliki bangunan pengolahan kompos
  - k. Jaringan telekomunikasi. Kantor UPTD Wilayah IV memiliki jaringan telekomunikasi berupa telepon kantor dan internet.
  - l. Jaringan air bersih. Kantor UPTD Wilayah IV memiliki jaringan air bersih yang terpasang pada bangunan.
  - m. Jaringan listrik. Kantor UPTD Wilayah IV memiliki jaringan instalasi listrik yang terpasang pada bangunan.

5. Prasarana Bangunan Kantor UPTD Metrologi

**c. Prasarana Pasar**

- 1. Pasar Kampung Baru Tengah.
  - a. Akses jalan pada kantor dengan panjang 16.882 m'
  - b. Pasar Kampung Baru Tengah tidak memiliki pagar.
  - c. Pasar Kampung Baru Tengah belum memiliki area muster point.
  - d. Memiliki jaringan air bersih yang terpasang pada bangunan.
  - e. Memiliki jaringan instalasi listrik yang terpasang pada bangunan.
  - f. Memiliki taman atau Ruang Terbuka Hijau dengan luasan 162 m<sup>2</sup>.
  - g. Belum memiliki sistem informasi penjualan barang dagangan.
  - h. Pasar Kampung Baru Tengah belum memiliki TPS pasar.
  - i. Belum memiliki toilet mobile

2. Pasar Inpres Kebun Sayur.
  - a. Akses jalan pada kantor dengan panjang 24 m'
  - b. Pagar dengan panjang keliling 35 m'
  - c. Area parkir dengan luas 1.600 m<sup>2</sup>.
  - d. Belum memiliki area muster point.
  - e. Penerangan jalan sejumlah 11 titik.
  - f. Memiliki jaringan air bersih yang terpasang pada bangunan.
  - g. Memiliki jaringan instalasi listrik yang terpasang pada bangunan.
  - h. Memiliki taman atau Ruang Terbuka Hijau seluas 378 m<sup>2</sup>.
  - i. Belum memiliki sistem informasi penjualan barang dagangan.
  - j. TPS pasar sejumlah 153 buah.
  - k. Belum memiliki toilet mobile
3. Pasar Pandan Sari.
  - a. Akses jalan pada kantor dengan panjang 12 m
  - b. Belum memiliki area muster point.
  - c. Memiliki jaringan air bersih yang terpasang pada bangunan.
  - d. Memiliki jaringan instalasi listrik yang terpasang pada bangunan.
  - e. Belum memiliki taman atau (Ruang Terbuka Hijau) RTH.
  - f. Belum memiliki sistem informasi penjualan barang dagangan.
  - g. TPS pasar sejumlah 124 buah.
  - h. Belum memiliki toilet mobile
4. Pasar Klandasan.
  - a. Akses jalan pada kantor dengan panjang 12 m
  - b. Area parkir dengan luas.525 m<sup>2</sup>.
  - c. Belum memiliki area muster point.
  - d. Penerangan jalan sejumlah 24 titik.
  - e. Memiliki jaringan air bersih yang terpasang pada bangunan.
  - f. Memiliki jaringan instalasi listrik yang terpasang pada bangunan.
  - g. Belum memiliki taman atau (Ruang Terbuka Hijau) RTH.
  - h. Belum memiliki sistem informasi penjualan barang dagangan.
  - i. TPS pasar sejumlah 380 buah.
  - j. Belum memiliki toilet mobile
5. Pasar Damai Balikpapan Permai.
  - a. Akses jalan pada kantor dengan panjang 24 m
  - b. Area parkir dengan luas.600 m<sup>2</sup>.
  - c. Belum memiliki area muster point.
  - d. Penerangan jalan sejumlah 25 titik.
  - e. Memiliki jaringan air bersih yang terpasang pada bangunan.
  - f. Memiliki jaringan instalasi listrik yang terpasang pada bangunan.
  - g. Belum memiliki taman atau (Ruang Terbuka Hijau) RTH.
  - h. Belum memiliki sistem informasi penjualan barang dagangan.
  - i. Belum memiliki toilet mobile
6. Pasar Sepinggan.
  - a. Akses jalan pada kantor dengan panjang 12 m
  - b. Area parkir dengan luas.700 m<sup>2</sup>
  - c. Belum memiliki area muster point.
  - d. Penerangan jalan sejumlah .20 titik.



- e. Memiliki jaringan air bersih yang terpasang pada bangunan.
- f. Memiliki jaringan instalasi listrik yang terpasang pada bangunan.
- g. Belum memiliki taman atau (Ruang Terbuka Hijau) RTH.
- h. Belum memiliki sistem informasi penjualan barang dagangan.
- i. Belum memiliki toilet mobile

7. Pasar Kampung Baru Tengah

- a. memiliki jaringan air bersih dan jaringan listrik yang terpasang pada bangunan
- b. Belum memiliki taman atau (Ruang Terbuka Hijau) RTH.
- c. Belum memiliki sistem informasi penjualan barang dagangan
- d. Belum memiliki toilet mobile

8. Pasar Teritip.

- a. Akses jalan pada kantor dengan panjang 24. m
- b. Area parkir dengan luas.800 m<sup>2</sup>.
- c. Belum memiliki area muster point.
- d. Penerangan jalan sejumlah 24 titik.

Sedangkan aset yang tidak berwujud yang dimiliki terdiri atas :

- 1. Website sahabat.co sebagai situs pemaparan harga bahan pokok strategis harian

### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan**

Berikut disampaikan hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan pada Tahun 2020-2024:



**Tabel 2.1.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan**  
**Kota Balikpapan**

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Kota					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=11/6* 100%	(17)= 12/7*100 %	(18)=13/8* 100%	(19)=14/9* 100%	(20)=15/10 *100%
(1)	(2)	(3)	K (4)	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K(%)	K (%)	K (%)	K (%)	K (%)
1	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan			N/A	N/A	3,50%	5,25%	5,80%	N/A	N/A	5,29%	5,66%	9,77%	N/A	N/A	151	108	168
2	pertumbuhan nilai ekspor non migas			N/A	N/A	6,51%	6,52%	6,53%	N/A	N/A	19,84%	-20,04%	-16,73%	N/A	N/A	305	-307	-256
3	persentase wajib tera yang melakukan tera / tera ulang			N/A	80,06%	78%	81%	84%	N/A	78,38%	69,19%	72,81%	88,69%	N/A	N/A	89	90	106
4	inflasi pangan bergejolak			N/A	N/A	(3 - 5)%	(3 - 5)%	(3 - 5)%	N/A	N/A	5,81%	6,76%	3,54%	N/A	N/A	86	74	100
5	persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun / ditingkatkan kapasitasnya / direvitalisasi			N/A	N/A	8,3%	8,3%	8,3%	N/A	N/A	8,33%	8,33%	8,33%	N/A	N/A	100	100	100



RENSTRA DINAS PERDAGANGAN  
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Kota					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=11/6* 100%	(17)= 12/7*100 %	(18)=13/8* 100%	(19)=14/9* 100%	(20)=15/10 *100%
(1)	(2)	(3)	K '(4)	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K(%)	K (%)	K (%)	K (%)	K (%)
6	persentase pertumbuhan pelaku usaha yang telah memperoleh izin sesuai dengan ketentuan			N/A	N/A	8,1%	8,7%	9,4%	N/A	N/A	6,80%	6,34%	25,07%	N/A	N/A	84	72	265
7	Nilai SAKIP perangkat daerah			N/A	N/A	67	70	73	N/A	66,23	69,98	69,41	71,03	N/A	N/A	104	99	97
8	Persentase kinerja realisasi pupuk		√	N/A	N/A	28%	28%	29%	N/A	N/A	11,60%	87%	75,16%	N/A	N/A	41	311	259
9	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku		√	N/A	N/A	70%	71%	73%	N/A	N/A	68,9%	88%	75,7%	N/A	N/A	98	124	104

Berdasarkan Tabel T.2.1.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan di atas dapat diuraikan realisasi kinerja berdasarkan Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Balikpapan :

1. Indikator Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (satuan : persen)

Indikator ini merupakan indikator tujuan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan yang menjadi patokan keberhasilan kinerja Dinas Perdagangan. Dari tabel di atas terlihat rasio capaian pada tahun 2022-2024 selalu diatas 100% serta realisasi setiap tahun meningkat, Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan yang terus meningkat di Kota Balikpapan.

2. Pertumbuhan nilai ekspor non migas (satuan : persen)

Dari tabel diatas terlihat rasio capaian pada indikator ini cukup variatif, pada Tahun 2022 diatas 100%, tetapi pada Tahun 2023 dan 2024 dibawah 100%. Hal ini lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal Disdag, misal pada Tahun 2024 capaian dibawah 100% disebabkan karena beberapa peristiwa internasional dan beberapa kebijakan terkait seperti adanya situasi perang di eropa yaitu antara rusia dan ukraina, dan pengaruh beberapa kebijakan terkait ekspor yakni pemberlakuan kebijakan pemerintah tentang Domestic Market Obligation utk CPO sejak 31 Januari 2022 menjadi kendala bagi pelaku usaha untuk ekspor karna biasanya Persetujuan Ekspor (PE) hanya dilakukan sekali utk ekspor namun dg adanya peraturan baru setiap kali ekspor harus melakukan PE, Penyebab lainnya yaitu Adanya pemberlakuan ukuran standar ekspor untuk komoditi kepiting yang mewajibkan size 12 cm. Indikator ini direkomendasikan untuk tidak digunakan lagi pada Renstra selanjutnya karena kurang mencerminkan kinerja Disdag.

3. Persentase wajib tera yang melakukan tera / tera ulang (satuan : persen)

Dari Tabel diatas terlihat rasio capaian pada indikator ini pada Tahun 2022-2024 meningkat setiap tahunnya artinya jumlah wajib tera yang menunaikan kewajibannya sudah sesuai target. Faktor-faktor penyebabnya diantaranya :

- Meningkatnya kesadaran dari pemilik alat UTTP untuk menerakan alat ukur mereka.
- Adanya kewajiban bagi pemilik alat UTTP untuk memiliki alat ukur yang bertanda tera sah seperti agen dan pangkalan LPG harus memiliki timbangan yang bertanda tera sah yang diwajibkan oleh Pertamina, serta peran serta dari pihak lain untuk ikut serta dalam kegiatan tera/tera ulang di pasar.
- Pengawasan terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya pada tahun berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Inflasi pangan bergejolak (satuan : persen)

Dari Tabel diatas terlihat rasio capaian pada indikator ini pada Tahun 2022-2024 meningkat, khususnya pada Tahun 2024 mencapai 100% yang menandakan bahwa inflasi cenderung stabil. Pengendalian inflasi dilakukan secara konsisten melalui pasar murah, toko penyeimbang dan Kerjasama antar daerah.

5. Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun / ditingkatkan kapasitasnya / direvitalisasi (satuan : persen)

Dari tabel diatas terlihat rasio capaian pada indikator ini pada Tahun 2022-2024 mencapai 100 % realisasi mencapai target artinya sarana distribusi

yang dibangun sesuai dengan target yang ditentukan. Pencapaian kinerja ini sangat didukung dengan personel yang kompeten serta anggaran yang memadai baik dari Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi.

6. persentase pertumbuhan pelaku usaha yang telah memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (satuan : persen)

Dari tabel diatas terlihat rasio capaian pada indikator ini pada Tahun 2022-2024 meingkat, khususnya pada Tahun 2024, artinya semakin banyak pelaku usaha menyadari pentingnya legalitas berusaha.

7. Nilai SAKIP perangkat daerah

Dari tabel diatas terlihat rasio capaian pada indikator ini pada Tahun 2022-2024 menurun sedangkan kalau dilihat realisasinya cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan penentuan target di awal yang terlalu optimis.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain :

- a. Adanya komitmen pimpinan untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka mewujudkan good dan clean governance. Komitmen ditunjukkan dengan memberi arahan kepada staf pada saat apel pagi maupun pada saat rapat rutin staf.
- b. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi melalui penggunaan aplikasi diantaranya E-Office, SIPD, SIPKD, Siperangko, SIRUP, LPSE,e-SAKIP, Siporter Bapok, dan sebagainya
- c. Pelaksanaan rapat rutin tiap bulan pembahasan progress realisasi fisik dan anggaran
- d. Pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Individu yang tertuang didalam Perjanjian Kinerja dan SKP yang telah ditetapkan

8. Persentase kinerja realisasi pupuk (satuan : persen)

Indikator ini merupakan indikator kinerja kunci dengan rasio capaian yang meningkat di tahun 2023 dan 2024. Perubahan peraturan yang mengurangi jenis pupuk bersubsidi mengakibatkan realisasi menjadi lebih besar daripada target. Dinas Perdagangan sebagai pihak yang mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi terhadap distributor pupuk.

9. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (satuan : persen)

Indikator ini merupakan indikator kinerja kunci dengan rasio capaian di atas 100%. Faktor keberhasilan sama dengan indikator no 3.

-



**Tabel 2.1.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perdagangan**  
**Kota Balikpapan**

Program / Kegiatan	Anggaran pada tahun ke -					Realisasi Anggaran pada tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke -					Rata - rata pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	N/A	0	355.000.000	375.159.780	164.523.500	N/A	-	329.005.810	347.979.330	129.348.033	N/A	N/A	93%	93%	79%	-25,23%	-25,65%
Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	N/A	10.753.734.482	12.931.131.950	27.128.566.326	39.849.384.700	N/A	8.875.801.328	9.218.476.158	26.135.431.582	38.649.611.233	N/A	83%	71%	96%	97%	58,98%	203,33%
Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	N/A	99.945.000	569.712.550	538.181.000	734.351.500	N/A	71.104.753	506.823.504	432.209.025	624.183.296	N/A	71%	89%	80%	85%	166,98%	612,87%
Program pengembangan ekspor	N/A	474.918.000	60.000.000	221.439.788	332.542.000	N/A	435.079.664	59.945.210	219.188.709	310.410.009	N/A	92%	100%	99%	93%	77,29%	193,30%
Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	N/A	99.850.000	120.000.000	148.560.212	210.087.000	N/A	82.009.290	107.065.733	145.172.212	198.919.673	N/A	82%	89%	98%	95%	28,47%	78,49%
Program standarisasi dan perlindungan konsumen	N/A	548.880.207	519.191.632	513.356.332	693.404.876	N/A	459.710.881	490.453.532	479.954.622	661.262.526	N/A	84%	94%	93%	95%	9,51%	17,14%
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	N/A	13.765.892.294	15.339.641.284	17.063.534.870	19.531.572.100	N/A	11.378.611.357	13.253.069.224	15.261.267.512	17.752.102.049	N/A	83%	86%	89%	91%	12,38%	37,07%
Total	-	25.743.219.983	29.894.677.416	45.988.798.308	61.515.865.676		21.302.317.273	23.964.839.170	43.021.202.992	58.325.836.819							
Rata-rata												82%	89%	93%	91%		

Berdasarkan Tabel 2.1.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan di atas dapat diuraikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke 1 pada tahun 2021, diperoleh hasil sebesar 82%.
- b. Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke 2 pada tahun 2022, diperoleh hasil sebesar 89%.
- c. Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke 3 pada tahun 2023, diperoleh hasil sebesar 93%.
- d. Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke 4 pada tahun 2024, diperoleh hasil sebesar 91%.

Realisasi anggaran yang diperoleh cukup baik menandakan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kota Balikpapan. Untuk

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Perdagangan diantaranya :

- a. Komitmen pimpinan dan jajarannya dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang telah direncanakan
- b. Tercukupinya sumber daya manusia dalam hal pengelolaan administrasi pelaksanaan kegiatan maupun dalam hal pengelolaan keuangan
- c. Sistem pengelolaan keuangan yang berbasis aplikasi

2.1.4            **Kelompok Sasaran Layanan**

Berikut adalah uraian lebih lanjut mengenai kelompok sasaran pelayanan Dinas Perdagangan :

Kelompok Sasaran	Sub-Sasaran	Jenis Layanan
<b>Pelaku Usaha</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pedagang pasar rakyat</li><li>- Ritel modern</li><li>- UMKM</li><li>- Eksportir &amp; Importir</li><li>- Pelaku usaha lainnya</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fasilitasi perizinan usaha</li><li>- Fasilitasi Surat keterangan asal</li><li>- Pembinaan &amp; pelatihan</li><li>- Promosi &amp; pameran dagang</li><li>- Akses berjualan di pasar rakyat</li><li>- Layanan tera/tera ulang</li></ul>
<b>Konsumen/Masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengguna pasar rakyat</li><li>- Masyarakat pada umumnya</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perlindungan konsumen</li><li>- Stabilitas harga barang pokok</li><li>- Penyediaan sarana &amp; prasarana pasar</li></ul>
<b>Pemerintah &amp; Lembaga Terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pemerintah pusat &amp; daerah</li><li>- Lembaga pengawas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sinkronisasi kebijakan</li><li>- Pengawasan perdagangan</li><li>- Penyusunan data &amp; informasi perdagangan</li></ul>
<b>Kelompok Strategis Lain</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Investor</li><li>- Lembaga pendidikan/pelatihan</li><li>- Mahasiswa/pelajar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kerja sama investasi</li><li>- Edukasi &amp; literasi perdagangan</li></ul>

2.2            **Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Dinas Perdagangan memiliki wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan khususnya di Kota Balikpapan menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi baik dimasa sekarang maupun di masa mendatang. Identifikasi permasalahan sangat diperlukan

sebagai acuan dalam mendapatkan solusi yang tepat dan terarah sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Permasalahan pelayanan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.2.1  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Penyebab masalah /Akar Masalah
Kelancaran distribusi barang pokok dan barang penting belum optimal	Belum optimalnya pengelolaan sarana distribusi perdagangan	- Belum optimalnya revitalisasi pasar rakyat - Kurang optimalnya pengelolaan/pemanfaatan kios/petak di pasar rakyat
Stabilitas stok dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting belum optimal	Harga barang kebutuhan pokok dan ba	Terbatasnya produksi barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kota Balikpapan
	Ketergantungan terhadap daerah pemasok barang kebutuhan pokok dan barang penting	Iklim/cuaca tidak menentu
	Sistem distribusi /rantai pasok dari produsen ke konsumen masih panjang (kurang efektif)	Belum optimalnya kerjasama/informasi terkait rantai pasok (tindakan-->fasilitasi melalui business matching)
Belum optimalnya perlindungan konsumen	- Belum optimalnya pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan	- Kesadaran dari pelaku usaha/pedagang yang masih kurang - Penegakan dan Penindakan peraturan yang belum optimal (UU no.2 th 1981 tentang Metrologi Legal)
Belum terlaksananya tertib niaga secara maksimal	Masih adanya pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan tidak sesuai dengan ketentuan	-Kurangnya literasi pelaku usaha terkait tertib niaga - Penegakan dan Penindakan peraturan yang belum optimal
Belum optimalnya ekspor	Belum optimalnya promosi dan pemasaran produk ke luar daerah	- Kurangnya fasilitasi promosi kepada pelaku usaha di bidang perdagangan
		- Keterbatasan informasi terkait pemasaran dalam dan luar negeri
	Kurang optimalnya kesempatan akses pasar yang telah diberikan kepada pelaku usaha	- Kurangnya keberlanjutan terhadap akses pasar yang telah diberikan
	Keterbatasan jumlah eksportir di Balikpapan	Kurangnya motivasi dan pemanfaatan kesempatan bagi Pelaku usaha untuk ekspansi produk secara nasional dan internasional

Sumber data : Hasil Analisa Dinas Perdagangan Kota Balikpapan



Setelah dilakukan identifikasi serta analisis permasalahan dan lingkungan yang telah dibahas sebelumnya, maka perlu dilakukan perumusan isu-isu strategis. Isu strategis adalah masalah-masalah prioritas yang harus segera ditangani untuk mencapai tujuan. Identifikasi dilakukan sesuai dengan lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi kinerja Dinas Perdagangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut disajikan tabel guna mempermudah dalam penyimpulan isu strategis

**Tabel 2.2.2 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Perdagangan**

Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
		Global	Nasional	Regional	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kelancaran distribusi barang pokok dan barang penting belum optimal 2. Stabilitas stok dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting belum optimal 3. Belum optimalnya perlindungan konsumen 4. Belum terlaksananya tertib niaga secara maksimal 5. Belum optimalnya ekspor	1. Dampak bangkitan Pembangunan IKN dan Optimalisasi Pengelolaan Sanitasi, Limbah dan Sampah  2. Kecukupan, Keamanan dan Pemanfaatan Pangan	1. Perubahan geopolitik dan peta ekonomi dunia 2. Konstelasi Perdagangan Global 3. Perubahan Iklim 4. Konflik Antarnegara	1. Penguatan infrastruktur 2. Pembangunan IKN 3. Integrasi Domestik Terbatas 4. Ketahanan Ekonomi	1. Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi 2. Kemandirian pangan 3. Transformasi Ekonomi Berbasis Industrialisasi yang Inklusif 4. Superhub IKN	Belum optimalnya kinerja sektor perdagangan

### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

##### 3.1

##### **Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perdagangan Kota Balikpapan**

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Tahun 2025–2029, Dinas Perdagangan memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola perdagangan yang sehat, berdaya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Visi dan Misi RPJMD Kota Balikpapan 2025-2029 dimana arah pembangunan Kota Balikpapan berdasarkan Visi Walikota Terpilih adalah ***“Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman”***

Dengan penjabaran misi sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan pemerintah yang bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan masyarakat;
2. Membangun dan mengembangkan infrastruktur yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat Balikpapan;
3. Membangun dan mengembangkan kehidupan sosial yang kondusif untuk menciptakan Masyarakat yang sehat dan terdidik;
4. Mengembangkan perekonomian yang tumbuh berkeadilan untuk manusia
5. Konsisten menjaga lingkungan hidup yang sehat dan nyaman untuk semua

Keterkaitan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan pada RPJMD Kota Balikpapan 2025-2029, yaitu pada Sasaran RPJMD ***“Meningkatnya Produktifitas Perekonomian Daerah yang Merata dan Berkelanjutan “***.

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Balikpapan dapat kita rumuskan pada tabel sebagai berikut

Tabel 3.1.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN											
- Meningkatkan produktifitas perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perdagangan		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (%)	9,77	9,77	9,78	9,79	9,8	9,81	9,82	
		Meningkatnya Daya Saing Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Omset Pelaku Usaha Perdagangan (%)	-	1,5	1,75	2	2,25	2,5	3	
		Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien Variasi Harga antar Waktu (%)	5,2	1-5.2	1-5.2	1-5.2	1-5.2	1-5.2	1-5.2	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	71,03	73,12	73,5	74	74,5	75	75,5	

3.2

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah dirumuskan, Dinas Perdagangan Kota menetapkan strategi dan kebijakan pembangunan sektor perdagangan yang berorientasi pada peningkatan daya saing, stabilitas pasokan, perlindungan konsumen, serta transformasi pelayanan publik. Strategi yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perdagangan Kota Balikpapan. Penahapan merupakan prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan. Berikut disampaikan penahapan dan lokus Renstra Dinas Perdagangan sesuai tabel berikut ini

Tabel 3.2.1 Penahapan Renstra Dinas Perdagangan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Revitalisasi Pasar Inpres Kebun Sayur	Pembanguna n Pasar Induk (Tahap I)	Pasar Pandansari	Revitalisasi Pasar Damai/BP	Revitalisasi Pasar Sepinggian
Revitalisasi Pasar Penampunga n A	Revitalisasi Pasar Kampung Baru Tengah	Revitalisasi Pasar Batu Ampar (Eks Pasar Ban)	Pembanguna n Pasar Induk (Tahap III)	Pembangunan Pasar Induk (Tahap IV)
	Pembanguna n Pasar Kuliner (Eks Pasar Burung Damai III)	Pembanguna n Pasar Induk (Tahap II)		
Pemantauan Stok dan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pemantauan Stok dan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pemantauan Stok dan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pemantauan Stok dan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pemantauan Stok dan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Pasar Murah	Pasar Murah	Pasar Murah	Pasar Murah	Pasar Murah
Kerjasama daerah	Kerjasama daerah	Kerjasama daerah	Kerjasama daerah	Kerjasama daerah

Sedangkan penyusunan arah kebijakan Renstra Dinas Perdagangan Kota Balikpapan pada pirnsipnya mengacu pada operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD Kota Balikpapan serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perdagangan Kota Balikpapan. Berikut disampaikan tabel arah kebijakan Renstra Dinas Perdagangan

**Tabel 3.2.2**  
**Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Dinas Perdagangan**

No	Operasionalisas i NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Produktifitas Perekonomian Daerah yang Merata dan Berkelanjutan	1. Pengendalian inflasi daerah 2. Pengembangan daya tarik wisata kota, infrastruktur pendukung MICE, dan industri hospitality 3. Pengembangan IKM dan UMKM yang berdayasaing serta penumbuhan minat wirausaha baru.	1. Peningkatan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting 2. Peningkatan fasilitasi promosi produk lokal 3. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan 4. Peningkatan pengawasan dan penyuluhan metrologi legal 5. Peningkatan pengawasan dan pembinaan tertib niaga 6. Peningkatan kualitas pelayanan metrologi legal	

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN**  
**BIDANG URUSAN**

**4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan**

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Perdagangan Kota Balikpapan dengan tetap mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang dapat dilihat ada tabel berikut,

**Tabel 4.1.1**  
**Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN</b>							
- Meningkatkan produktifitas perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perdagangan				Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (%)		
		Meningkatnya Daya Saing Perdagangan			Persentase Pertumbuhan Omset Pelaku Usaha Perdagangan (%)		
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha		Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
				Meningkatnya kinerja Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik (laporan)	3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGA
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	
					Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
					Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik (laporan)	3.30.02.2.01.0002 - Fasilitas pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terverifikasinya dokumen TDG	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
					Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	3.30.02.2.02.0001 - Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
				Terverifikasinya permohonan SKPL MB	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.05 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	
					Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.05.0001 - Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi atau Berpotensi Ekspor		Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berorientasi atau Berpotensi Ekspor (%)	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
				Meningkatnya pelaku usaha yang difasilitasi promosi dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya perlindungan konsumen melalui tertib ukur		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				Meningkatnya kepatuhan dan kesadaran pengukuran	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		Persentase Produk Lokal yang Difasilitasi Promosi (%)	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
				Meningkatnya fasilitas promosi bagi pelaku usaha binaan	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETE
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting			Koefisien Variasi Harga antar Waktu (%)		
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi		Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				Meningkatnya pasar rakyat yang representatif	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Meningkatnya kualitas pengelola pasar rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	3.30.03.2.02.0002 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting		Persentase Komoditi dengan Harga Rata-Rata di Bawah Harga Rata-Rata Provinsi (%)	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
				Tersedianya barang kebutuhan pokok dan barang penting	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGA
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3.30.04.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
				Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.30.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.30.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.30.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANG
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.30.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terwujudnya profesionalisme aparatur perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.30.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.30.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.30.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANG
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.30.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terwujudnya layanan umum perkantoran perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANG
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.30.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.30.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.30.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANG
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.30.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Terwujudnya operasional umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar berfungsi optimal	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGA
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
<b>3.30.0.00.0.00.01.0001 - UPTD Pasar Wilayah I</b>							
- Meningkatnya produktifitas perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perdagangan	Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi		Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				Meningkatnya pasar rakyat yang representatif	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANG
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01.0002 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
3.30.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Pasar Wilayah II							
- Meningkatnya produktifitas perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perdagangan	Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi		Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				Meningkatnya pasar rakyat yang representatif	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01.0002 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
3.30.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Pasar Wilayah III							
- Meningkatnya produktifitas perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perdagangan	Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi		Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANG
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya pasar rakyat yang representatif	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01.0002 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
3.30.0.00.0.00.01.0004 - UPTD Pasar Wilayah IV							
- Meningkatkan produktifitas perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perdagangan	Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi		Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				Meningkatnya pasar rakyat yang representatif	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01.0002 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANG
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>3.30.0.00.0.00.01.0005 - UPTD Metrologi</b>							
- Meningkatnya produktifitas perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perdagangan	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan	Meningkatnya perlindungan konsumen melalui tertib ukur		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				Meningkatnya kepatuhan dan kesadaran pengukuran	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
					Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	

#### **4.2 Pendanaan Indikatif**

Untuk merealisasikan program, kegiatan dan subkegiatan pada Dinas Perdagangan Kota Balikpapan maka perlu didukung oleh dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), APBD Provinsi dan APBN. Adapun proyeksi pendanaan indikatif tahun 2026 s/d 2030 tercantum pada lampiran Tabel berikut ini

Tabel 4.2.1  
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				100.522.170.000		103.537.835.000		108.714.727.000		110.889.022.000		114.215.693.000	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				22.885.774.272		23.590.320.000		24.179.950.000		24.784.450.000		25.404.060.000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	75,62	75,8	22.885.774.272	75,9	23.590.320.000	76	24.179.950.000	76,1	24.784.450.000	76,2	25.404.060.000	3.30.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				75.635.000		40.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	
Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	2	75.635.000	2	40.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	
3.30.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				75.635.000		40.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	2	75.635.000	2	40.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	
3.30.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.241.174.515		15.622.320.000		16.012.750.000		16.413.070.000		16.823.400.000	
Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	864	1.008	15.241.174.515	1.022	15.622.320.000	1.036	16.012.750.000	1.050	16.413.070.000	1.064	16.823.400.000	
3.30.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				15.241.174.515		15.622.320.000		16.012.750.000		16.413.070.000		16.823.400.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	864	1.008	15.241.174.515	1.022	15.622.320.000	1.036	16.012.750.000	1.050	16.413.070.000	1.064	16.823.400.000	
3.30.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				524.240.000		557.220.000		815.373.500		486.500.000		886.093.500	
Terwujudnya profesionalisme aparatur perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	524.240.000	1	557.220.000	0	815.373.500	0	486.500.000	1	886.093.500	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	27				27				27		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	45		55		55		55		55		
3.30.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				37.740.000		70.720.000		0		0		70.720.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	37.740.000	1	70.720.000	0	0	0	0	1	70.720.000	
3.30.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				486.500.000		486.500.000		486.500.000		486.500.000		486.500.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	45	486.500.000	55	486.500.000	55	486.500.000	55	486.500.000	55	486.500.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	4		4		4		4		4		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	6		6		4		4		4		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
3.30.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				75.444.600		100.000.000		100.000.000		110.000.000		110.000.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	75.444.600	1	100.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.30.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				228.188.667		336.184.469		386.464.751		444.410.386		444.405.058	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	6	228.188.667	6	336.184.469	4	386.464.751	4	444.410.386	4	444.405.058	
3.30.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				550.564.555		620.386.062		744.463.274		744.463.274		744.463.274	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	550.564.555	6	620.386.062	6	744.463.274	6	744.463.274	6	744.463.274	
3.30.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				327.022.935		397.922.109		417.818.214		417.818.214		438.709.125	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	4	327.022.935	4	397.922.109	4	417.818.214	4	417.818.214	4	438.709.125	
3.30.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				105.250.000		121.212.000		127.272.600		127.272.600		127.272.600	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	105.250.000	1	121.212.000	1	127.272.600	1	127.272.600	1	127.272.600	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.30.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				228.188.667		336.184.469		386.464.751		444.410.386		444.405.058	
3.30.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				90.660.050		62.788.880		65.928.324		65.928.324		69.224.740	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	1	90.660.050	1	62.788.880	1	65.928.324	1	65.928.324	1	69.224.740	
3.30.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				417.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	44	65	417.000.000	65	350.000.000	65	350.000.000	65	350.000.000	65	350.000.000	
3.30.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				50.000.000		0		80.000.000		0		85.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	1	50.000.000	0	0	1	80.000.000	0	0	1	85.000.000	
3.30.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.018.098.550		1.332.693.695		1.166.693.695		1.230.426.641		1.166.693.695	
Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	69	1.018.098.550	70	1.332.693.695	70	1.166.693.695	70	1.230.426.641	70	1.166.693.695	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	2		2		2		2		2		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	5		5		5		5		5		
3.30.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				724.316.000		724.316.000		724.316.000		724.316.000		724.316.000	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	5	724.316.000	5	724.316.000	5	724.316.000	5	724.316.000	5	724.316.000	
3.30.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		269.777.695		269.777.695		269.777.695		269.777.695	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	2	0	2	269.777.695	2	269.777.695	2	269.777.695	2	269.777.695	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.30.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				293.782.550		338.600.000		172.600.000		236.332.946		172.600.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	69	293.782.550	70	338.600.000	70	172.600.000	70	236.332.946	70	172.600.000	
3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.803.085.650		2.893.408.785		2.687.955.642		3.133.436.561		2.863.145.008	
Terwujudnya operasional umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	2.803.085.650	1	2.893.408.785	1	2.687.955.642	1	3.133.436.561	1	2.863.145.008	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	6		6		6		6		6		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	36		36		36		36		36		
3.30.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		4.500.000		4.500.000		5.000.000		5.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	5.000.000	1	4.500.000	1	4.500.000	1	5.000.000	1	5.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.30.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.097.186.000		994.826.085		947.453.414		947.453.414		1.044.567.390	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	36	1.097.186.000	36	994.826.085	36	947.453.414	36	947.453.414	36	1.044.567.390	
3.30.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.700.899.650		1.894.082.700		1.736.002.228		2.180.983.147		1.813.577.618	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	6	1.700.899.650	6	1.894.082.700	6	1.736.002.228	6	2.180.983.147	6	1.813.577.618	
3.30.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.379.409.750		1.156.184.000		1.190.230.000		1.226.124.000		1.260.653.000	
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar berfungsi optimal	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	13	1.379.409.750	13	1.156.184.000	13	1.190.230.000	13	1.226.124.000	13	1.260.653.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	22	22		22		22		22		22		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	152	155		155		155		155				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	6	5		4		3		3		3		
3.30.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				121.507.750		345.000.000		363.100.000		382.200.000		399.215.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	22	22	121.507.750	22	345.000.000	22	363.100.000	22	382.200.000	22	399.215.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.30.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				461.479.000		318.760.000		334.706.000		351.500.000		369.014.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	13	461.479.000	13	318.760.000	13	334.706.000	13	351.500.000	13	369.014.000	
3.30.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				212.424.000		142.424.000		142.424.000		142.424.000		142.424.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	152	155	212.424.000	155	142.424.000	155	142.424.000	155	142.424.000	155	142.424.000	
3.30.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				583.999.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasii (Unit)	6	5	583.999.000	4	350.000.000	3	350.000.000	3	350.000.000	3	350.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				130.744.300		322.204.000		324.840.000		328.122.000		332.058.000	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	-	63	130.744.300	63	322.204.000	64	324.840.000	65	328.122.000	66	332.058.000	3.30.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan				28.298.000		246.204.000		248.200.000		248.700.000		251.700.000	
Meningkatnya kinerja Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/ perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik (laporan)	-	0	28.298.000	12	246.204.000	12	248.200.000	12	248.700.000	12	251.700.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
3.30.02.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				28.298.000		24.504.000		26.500.000		27.000.000		30.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1	1	28.298.000	1	24.504.000	1	26.500.000	1	27.000.000	1	30.000.000	
3.30.02.2.01.0002 - Fasilitas pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik				0		221.700.000		221.700.000		221.700.000		221.700.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/ perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik (laporan)	-	0	0	12	221.700.000	12	221.700.000	12	221.700.000	12	221.700.000	
3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang				53.948.000		34.000.000		34.340.000		35.422.000		36.000.000	
Terverifikasinya dokumen TDG	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	37	15	53.948.000	15	34.000.000	15	34.340.000	15	35.422.000	15	36.000.000	
3.30.02.2.02.0001 - Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang				53.948.000		34.000.000		34.340.000		35.422.000		36.000.000	
Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	37	15	53.948.000	15	34.000.000	15	34.340.000	15	35.422.000	15	36.000.000	
3.30.02.2.05 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat				48.498.300		42.000.000		42.300.000		44.000.000		44.358.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terverifikasinya permohonan SKPL MB	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	6	5	48.498.300	5	42.000.000	5	42.300.000	5	44.000.000	5	44.358.000	
3.30.02.2.05.0001 - Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C				48.498.300		42.000.000		42.300.000		44.000.000		44.358.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	6	5	48.498.300	5	42.000.000	5	42.300.000	5	44.000.000	5	44.358.000	
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				75.412.091.840		76.988.200.000		81.510.357.000		83.013.550.000		85.652.460.000	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	8,3	100	75.412.091.840	100	76.988.200.000	100	81.510.357.000	100	83.013.550.000	100	85.652.460.000	3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				63.763.994.160		62.268.200.000		65.650.357.000		66.013.550.000		67.561.210.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya pasar rakyat yang representatif	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	1	1	63.763.994.160	1	62.268.200.000	1	65.650.357.000	1	66.013.550.000	1	67.561.210.000	
3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				63.763.994.160		62.268.200.000		65.650.357.000		66.013.550.000		67.561.210.000	
Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	1	1	63.763.994.160	1	62.268.200.000	1	65.650.357.000	1	66.013.550.000	1	67.561.210.000	
3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				11.134.253.231		14.200.000.000		15.300.000.000		16.400.000.000		17.500.000.000	
Meningkatnya kualitas pengelola pasar rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	2	2	11.134.253.231	2	14.200.000.000	2	15.300.000.000	2	16.400.000.000	2	17.500.000.000	
3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				10.034.256.945		13.000.000.000		14.000.000.000		15.000.000.000		16.000.000.000	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	2	3	10.034.256.945	3	13.000.000.000	3	14.000.000.000	3	15.000.000.000	3	16.000.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.30.03.2.02.0002 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1.099.996.286		1.200.000.000		1.300.000.000		1.400.000.000		1.500.000.000	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	2	2	1.099.996.286	2	1.200.000.000	2	1.300.000.000	2	1.400.000.000	2	1.500.000.000	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	8,3	100	75.412.091.840	100	76.988.200.000	100	81.510.357.000	100	83.013.550.000	100	85.652.460.000	3.30.0.00.0.00.01. 0001 - UPTD Pasar Wilayah I
3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				139.992.270		140.000.000		150.000.000		160.000.000		170.000.000	
Meningkatnya pasar rakyat yang representatif	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	5	5	139.992.270	5	140.000.000	5	150.000.000	5	160.000.000	5	170.000.000	
3.30.03.2.01.0002 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				139.992.270		140.000.000		150.000.000		160.000.000		170.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	5	5	139.992.270	5	140.000.000	5	150.000.000	5	160.000.000	5	170.000.000	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	8,3	100	75.412.091.840	100	76.988.200.000	100	81.510.357.000	100	83.013.550.000	100	85.652.460.000	3.30.0.00.0.00.01. 0002 - UPTD Pasar Wilayah II
3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				129.969.075		130.000.000		140.000.000		150.000.000		130.000.000	
Meningkatnya pasar rakyat yang representatif	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	1	1	129.969.075	1	130.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	1	130.000.000	
3.30.03.2.01.0002 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				129.969.075		130.000.000		140.000.000		150.000.000		130.000.000	
Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	1	1	129.969.075	1	130.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	1	130.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	8,3	100	75.412.091.840	100	76.988.200.000	100	81.510.357.000	100	83.013.550.000	100	85.652.460.000	3.30.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Pasar Wilayah III
3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				134.923.880		140.000.000		150.000.000		160.000.000		170.000.000	
Meningkatnya pasar rakyat yang representatif	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	4	4	134.923.880	4	140.000.000	4	150.000.000	4	160.000.000	4	170.000.000	
3.30.03.2.01.0002 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				134.923.880		140.000.000		150.000.000		160.000.000		170.000.000	
Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	4	4	134.923.880	4	140.000.000	4	150.000.000	4	160.000.000	4	170.000.000	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	8,3	100	75.412.091.840	100	76.988.200.000	100	81.510.357.000	100	83.013.550.000	100	85.652.460.000	3.30.0.00.0.00.01.0004 - UPTD Pasar Wilayah IV

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				108.959.224		110.000.000		120.000.000		130.000.000		121.250.000	
Meningkatnya pasar rakyat yang representatif	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	2	2	108.959.224	2	110.000.000	2	120.000.000	2	130.000.000	2	121.250.000	
3.30.03.2.01.0002 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				108.959.224		110.000.000		120.000.000		130.000.000		121.250.000	
Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	2	2	108.959.224	2	110.000.000	2	120.000.000	2	130.000.000	2	121.250.000	
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				692.036.840		727.393.390		761.862.390		797.182.390		833.397.390	
Meningkatnya kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Komoditi dengan Harga Rata-Rata di Bawah Harga Rata-Rata Provinsi (%)	-	83	692.036.840	83	727.393.390	91	761.862.390	91	797.182.390	91	833.397.390	3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				168.829.840		280.627.500		315.096.500		350.416.500		386.631.500	
Tersedianya barang kebutuhan pokok dan barang penting	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	12	12	168.829.840	12	280.627.500	12	315.096.500	12	350.416.500	12	386.631.500	
3.30.04.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				168.829.840		280.627.500		315.096.500		350.416.500		386.631.500	
Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	12	12	168.829.840	12	280.627.500	12	315.096.500	12	350.416.500	12	386.631.500	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				523.207.000		446.765.890		446.765.890		446.765.890		446.765.890	
Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	12	12	523.207.000	12	446.765.890	12	446.765.890	12	446.765.890	12	446.765.890	
3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				523.207.000		446.765.890		446.765.890		446.765.890		446.765.890	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	12	12	523.207.000	12	446.765.890	12	446.765.890	12	446.765.890	12	446.765.890	
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				460.215.000		690.000.000		704.000.000		714.000.000		728.000.000	
Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi atau Berpotensi Ekspor	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berorientasi atau Berpotensi Ekspor (%)	-	5	460.215.000	7	690.000.000	9	704.000.000	12	714.000.000	13	728.000.000	3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				460.215.000		690.000.000		704.000.000		714.000.000		728.000.000	
Meningkatnya pelaku usaha yang difasilitasi promosi dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	3	9	460.215.000	10	690.000.000	11	704.000.000	12	714.000.000	13	728.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	4	4		5		6		7		8		
3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional				325.215.000		495.000.000		499.000.000		505.000.000		510.000.000	
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	3	9	325.215.000	10	495.000.000	11	499.000.000	12	505.000.000	13	510.000.000	
3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				135.000.000		195.000.000		205.000.000		209.000.000		218.000.000	
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	4	4	135.000.000	5	195.000.000	6	205.000.000	7	209.000.000	8	218.000.000	
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				793.713.748		984.717.610		989.717.610		994.717.610		999.717.610	
Meningkatnya perlindungan konsumen melalui tertib ukur	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	75,7	77,95	793.713.748	78,17	984.717.610	78,39	989.717.610	78,61	994.717.610	78,84	999.717.610	3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				229.717.610		429.717.610		429.717.610		429.717.610		429.717.610	
Meningkatnya kepatuhan dan kesadaran pengukuran	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	60	1.500	229.717.610	2.000	429.717.610	2.200	429.717.610	2.450	429.717.610	2.700	429.717.610	
3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal				229.717.610		429.717.610		429.717.610		429.717.610		429.717.610	
Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	60	1.500	229.717.610	2.000	429.717.610	2.200	429.717.610	2.450	429.717.610	2.700	429.717.610	
Meningkatnya perlindungan konsumen melalui tertib ukur	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	75,7	77,95	793.713.748	78,17	984.717.610	78,39	989.717.610	78,61	994.717.610	78,84	999.717.610	3.30.0.00.0.00.01.0005 - UPTD Metrologi
3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				563.996.138		555.000.000		560.000.000		565.000.000		570.000.000	
Meningkatnya kepatuhan dan kesadaran pengukuran	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3.503	3.600	563.996.138	3.610	555.000.000	3.620	560.000.000	3.630	565.000.000	3.640	570.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				563.996.138		555.000.000		560.000.000		565.000.000		570.000.000	
Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3.503	3.600	563.996.138	3.610	555.000.000	3.620	560.000.000	3.630	565.000.000	3.640	570.000.000	
3.30.07 - PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				147.594.000		235.000.000		244.000.000		257.000.000		266.000.000	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Produk Lokal yang Difasilitasi Promosi (%)	-	15	147.594.000	18	235.000.000	20	244.000.000	22	257.000.000	25	266.000.000	3.30.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				147.594.000		235.000.000		244.000.000		257.000.000		266.000.000	
Meningkatnya fasilitas promosi bagi pelaku usaha binaan	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	10	7	147.594.000	6	235.000.000	7	244.000.000	8	257.000.000	9	266.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				147.594.000		235.000.000		244.000.000		257.000.000		266.000.000	
Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	10	7	147.594.000	6	235.000.000	7	244.000.000	8	257.000.000	9	266.000.000	

4.3      Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

**Tabel 4.3.1**  
**Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN</b>				
1.	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	
			3.30.02.2.01.0002 - Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	
2.	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
3.	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
			3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
4.	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi atau Berpotensi Ekspor	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional	
5.	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
			3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
3.30.0.00.0.00.01.0005 - UPTD Metrologi				
6.	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya perlindungan konsumen melalui tertib ukur	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
			3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	

4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kota Balikpapan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja suatu perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi . IKU ditetapkan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar berkontribusi pada pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah.

Tabel 4.4.1  
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN										
1.	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	9,77	9,77	9,78	9,79	9,8	9,81	9,82	
2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,03	73,12	73,5	74	74,5	75	75,5	
3.	Persentase Pertumbuhan Omset Pelaku Usaha Perdagangan	%	-	1,5	1,75	2	2,25	2,5	3	
4.	Koefisien Variasi Harga antar Waktu	%	5,2	1-5.2	1-5.2	1-5.2	1-5.2	1-5.2	1-5.2	

Terdapat 1 indikator kinerja utama yang tidak memiliki baseline Tahun 2024. Indikator kinerja yang dimaksud merupakan indikator baru yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, data kinerja pada tahun

sebelumnya belum tersedia karena pengukuran terhadap indikator tersebut belum dilakukan pada periode Renstra sebelumnya. Penetapan indikator baru ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan sistem pengukuran kinerja, guna memastikan keselarasan dengan arah kebijakan strategis dan prioritas pembangunan yang lebih aktual dan relevan. Pengumpulan data dan pelaporan kinerja terhadap indikator ini akan dimulai sejak tahun pertama pelaksanaan Renstra, dan selanjutnya menjadi bagian dari evaluasi kinerja secara berkala.

4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perdagangan Kota Balikpapan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kinerja yang dipakai untuk memantau dan mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pada level unit kerja atau bidang tertentu yang mengacu pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tabel 4.5.1  
Indikator Kinerja Kunci Dinas Perdagangan Kota Balikpapan

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
1.	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	positif	%	9,77	9,77	9,78	9,79	9,8	9,81	9,82	
2.	Koefisien Variasi Harga antar Waktu	negatif	%	5,2	1-5.2	1-5.2	1-5.2	1-5.2	1-5.2	1-5.2	
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	positif	Nilai	71,03	73,12	73,5	74	74,5	75	75,5	
4.	Persentase Pertumbuhan Omset Pelaku Usaha Perdagangan	positif	%	-	1,5	1,75	2	2,25	2,5	3	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>											
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	positif	Indeks	75,62	75,7	75,8	75,9	76	76,1	76,2	
6.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	positif	%	75,7	76,15	77,95	78,17	78,39	78,61	78,84	
7.	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	positif	%	-	63	63	63	64	65	66	
8.	Persentase Komoditi dengan Harga Rata-Rata di Bawah Harga Rata-Rata Provinsi	positif	%	-	83	83	83	91	91	91	
9.	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berorientasi atau Berpotensi Ekspor	positif	%	-	5	5	7	9	12	13	
10.	Persentase Produk Lokal yang Difasilitasi Promosi	positif	%	-	15	15	18	20	22	25	
11.	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	positif	%	8,3	100	100	100	100	100	100	
12.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
13.	Persentase kinerja realisasi pupuk	positif	%	75,16	76	77	78	79	80	81	

Terdapat 5 indikator kinerja kunci yang tidak memiliki baseline Tahun 2024. Indikator kinerja yang dimaksud merupakan indikator baru yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, data kinerja pada tahun sebelumnya belum tersedia karena pengukuran terhadap indikator tersebut belum dilakukan pada periode Renstra sebelumnya. Penetapan indikator baru ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan sistem pengukuran kinerja, guna memastikan keselarasan dengan arah kebijakan strategis dan prioritas pembangunan yang lebih aktual dan relevan. Pengumpulan data dan pelaporan kinerja terhadap indikator ini akan dimulai sejak tahun pertama pelaksanaan Renstra, dan selanjutnya menjadi bagian dari evaluasi kinerja secara berkala.

## BAB V PENUTUP

Renstra Dinas Perdagangan Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun untuk memberikan arah, pedoman, dan acuan dalam penyelenggaraan pembangunan sektor perdagangan selama lima tahun ke depan. Seluruh tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang tertuang di dalamnya dirancang agar mampu menjawab isu-isu strategis, mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan daya saing perdagangan, perlindungan konsumen, dan kesejahteraan masyarakat.

Dokumen Renstra ini akan menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, serta menjadi instrumen evaluasi kinerja Dinas Perdagangan. Keberhasilan pelaksanaannya membutuhkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Dengan tersusunnya Renstra ini, Dinas Perdagangan Kota berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan secara konsisten, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu mewujudkan sektor perdagangan yang sehat, stabil, dan berdaya saing guna mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

. Besar harapan, Renstra yang telah disusun dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan di bidang perdagangan dan menciptakan iklim perdagangan yang kondusif sesuai Visi Kota Balikpapan **“Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua dalam Bingkai Madinatul Iman”**.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang ditetapkan setiap 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah yang adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Sesuai dengan amanat pasal 272 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa perangkat daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah dan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Dalam penyusunannya Renstra Perangkat Daerah melewati tahapan – tahapan seperti persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dan Penetapan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 108 - 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kemudian dokumen Renstra Perangkat Daerah di evaluasi dan dikendalikan untuk mendapatkan kesesuaian dengan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

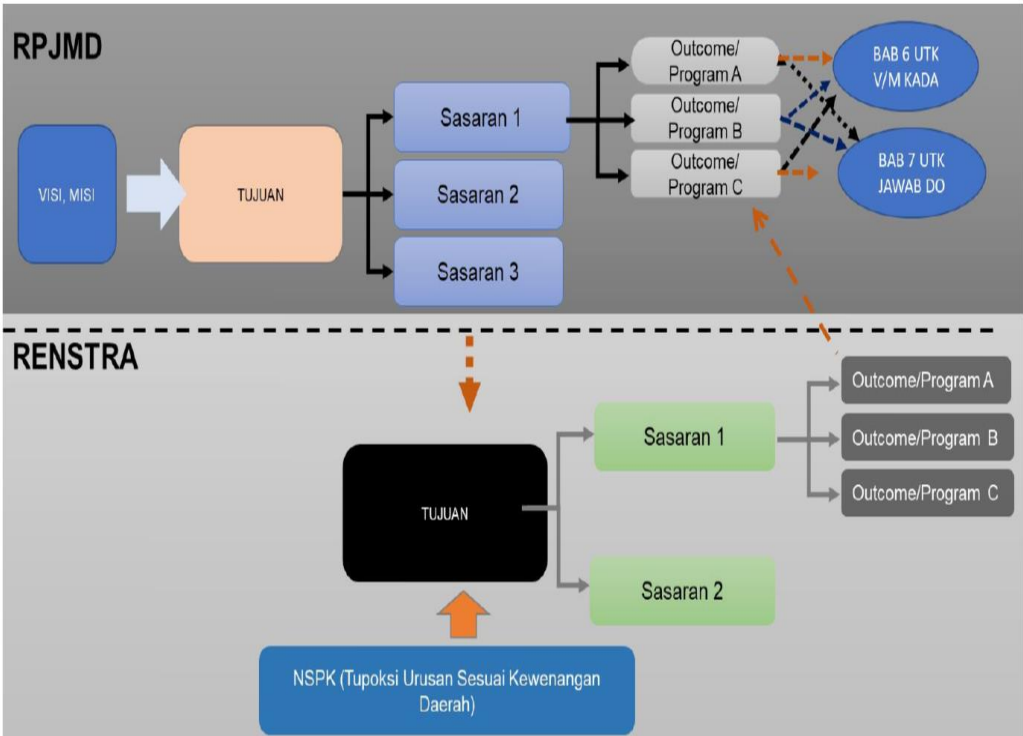
Penyusunan Renstra Sekretariat daerah juga berpedoman kepada Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 tahun 2025 yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk Periode 2025-2029. Inmendagri tersebut bertujuan untuk Menjamin kesinambungan pembangunan daerah yaitu memastikan bahwa pembangunan daerah yang berkelanjutan dapat terus berjalan, khususnya setelah adanya pergantian kepala daerah, Menyelaraskan perencanaan daerah dengan perencanaan nasional: RPJMD dan Renstra PD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta Meningkatkan kualitas pelayanan publik: Instruksi ini menekankan pentingnya penyusunan RPJMD dan Renstra PD yang fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik

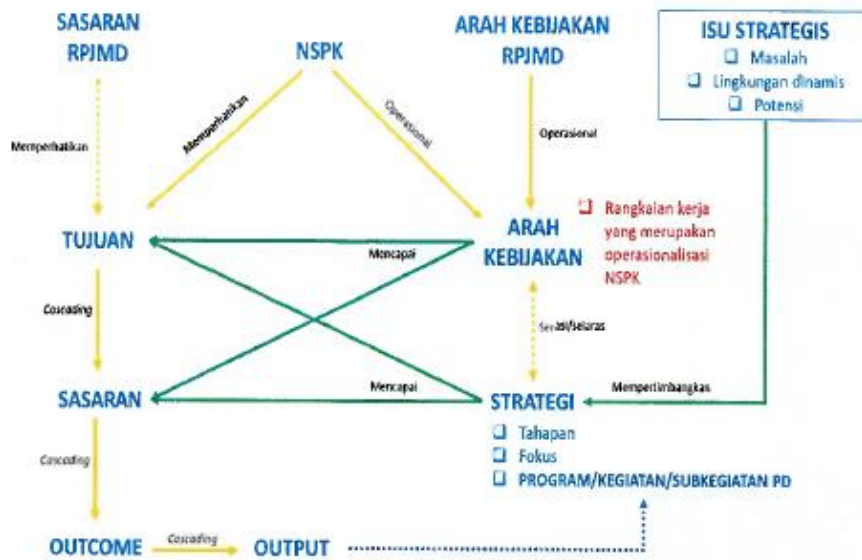
Pemerintah Kota Balikpapan saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yang saat ini sedang disusun secara simultan bersamaan waktu proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Sekretariat Daerah Kota Balikpapan merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan lembaga lainnya serta pelayanan administratif. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan 2025-2029 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki keterkaitan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 serta mengacu kepada RPJPD Kota Balikpapan, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJM Nasional. Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program –program prioritas untuk mewujudkan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pemerintah Kota Balikpapan.

**Gambar 1.1.**  
**Keterkaitan RPJMD Kota Balikpapan dan Renstra Sekretariat Daerah 2025-2029**



**Gambar 1.2.**  
**Konsep Renstra Sekretariat Daerah 2025-2029**



Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian visi Kota Balikpapan yaitu **‘BALIKPAPAN KOTA GLOBAL NYAMAN UNTUK SEMUA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN’**

**1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun 2025-2029 berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  15. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
  16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
  17. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) tahun 2025-2045;
  18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043;
  19. Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah ( Renstra PD) untuk Periode 2025-2029;
  20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
  21. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029;
  22. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Balikpapan.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun 2025-2029 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Balikpapan dengan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam menentukan

- prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Balikpapan, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
  4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

#### 1.4. **Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan disusun dengan mengacu pada Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah ( Renstra PD) untuk Periode 2025-2029

Adapun Sistematika Penulisan Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I       PENDAHULUAN**

1. Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029 berupa Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra PD
2. Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum
3. Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029
4. Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD tahun 2025-2029

#### **BAB II       GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Kinerja Pelayanan serta Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah.

RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis.

#### **BAB III       TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat penjabaran tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah yang akan dicapai selama kurun waktu lima tahun kedepan.

#### **BAB IV       PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat rencana program dan kegiatan, sub kegiatan serta Analisa kebutuhan pendanaan Sekretariat Daerah Kota

Balikpapan selama lima tahun yang dilengkapi dengan indikator kinerja. Serta Memuat indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD serta secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

## **BAB V        PENUTUP**

Bab ini memuat Kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan strategis Perangkat Daerah.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU**  
**STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan**

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah; dalam menjalankan tugasnya Sekretaris daerah dibantu oleh 3 Asisten;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
  1. Bagian Tata Pemerintahan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  2. Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  3. Bagian Hukum membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
  4. Bagian Kerja Sama membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
  1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  2. Bagian Administrasi Pembangunan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
    - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
    - b) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan;
  - 1. Bagian Umum dan Protokol membawahkan Subbagian Protokol dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - 2. Bagian Organisasi membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
  - 3. Bagian Perencanaan dan Keuangan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

#### **2.1.1 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekda dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kerjasama, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama. Untuk melaksanakan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerja sama;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerja sama yang berkaitan dengan tugasnya.

##### **2.1.1.1 Bagian Pemerintahan**

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;



- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

#### **2.1.1.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat**

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

#### **2.1.1.3 Bagian Hukum**

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi. Untuk melaksanakan tugas Bagian Hukum mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;

- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

#### **2.1.1.4 Bagian Kerja Sama**

Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, dan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama. Untuk melaksanakan tugas Bagian Kerja Sama mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan evaluasi kerjasama;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan evaluasi kerjasama;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan evaluasi kerjasama;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan evaluasi kerjasama;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kerjasama; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

#### **2.1.2 Asisten Perekonomian dan Pembangunan**

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugasmembantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam. Untuk melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam;
- c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam;

#### **2.1.2.1 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecilserta melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air. Untuk melaksanakan tugas BagianPerekonomiandan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil, sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil, sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,

dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil, bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air;

- d. fasilitasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pelaksanaan urusan bidang energi, sumber daya mineral di Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

#### **2.1.2.2 Bagian Administrasi Pembangunan**

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

#### **2.1.2.3 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Untuk melaksanakan tugas Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

#### **2.1.2.3.1 Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**

Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas:

- a. melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- c. menyusun strategi pengadaan barang/jasa;
- d. menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- e. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
- f. menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal/sektoral;
- g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

#### **2.1.3 Asisten Administrasi Umum**

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan. Untuk

melaksanakan tugasAsisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
- d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

#### **2.1.3.1 Bagian Umum dan Protokol**

Bagian Umum dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, serta melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi. Untuk melaksanakan tugas Bagian Umum dan Protokol mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

#### **2.1.3.1 Subbagian Protokol**

Subbagian Protokol mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;
- c. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan WaliKotadan Wakil WaliKota;
- d. menginformasikan jadwal dan kegiatan pemerintah Daerah; dan
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan WaliKota dan Wakil WaliKota.
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol yang berkaitan dengan tugasnya.

#### **2.1.3.2 Bagian Organisasi**

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi. Untuk melaksanakan tugas Bagian Organisasi melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

#### **2.1.3.3 Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:



- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

## **2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Balikpapan**

Sumber daya dalam birokrasi merupakan elemen-elemen yang saling terkait dan penting untuk mendukung kinerja dan keberhasilan birokrasi. Peningkatan kualitas SDM, efisiensi pengelolaan anggaran, penggunaan teknologi secara efektif, dan pengelolaan sumber daya material yang baik merupakan kunci untuk mencapai birokrasi yang efisien, efektif, dan berintegritas.

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya sumber daya aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala tantangan.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kota Balikpapan didukung oleh pegawai sebanyak 191 orang (data per Juni tahun 2025) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 128 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 50 Orang, Non Pegawai Negeri Sipil / Tenaga Bantuan sebanyak 13 orang.

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja dilingkungan Sekretariat Daerah, sebagaimana tabel di bawah ini :



**Tabel 2.1.**  
**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan**  
**Per Juni 2025**

No	Pimpinan/ Bagian	Eselon IIA	Eselon IIB	Eselon IIIA	Eselon IVA	Jabatan Fungsional	Staf	Jumlah
1	Sekretaris Daerah	1						1
2	Asisten		3					3
3	Staf Ahli		3					3
4	Bagian Keuangan			1		2	9	12
5	Bagian Umum dan Perengkapan					2	55	57
6	Bagian Organisasi			1		4	3	8
7	Bagian Humas dan Protokol				1	1	20	22
8	Bagian Pemerintahan			1		2	7	10
9	Bagian Kesejahteraan Rakyat			1		2	8	11
10	Bagian Hukum			1		8	6	15
11	Bagian Kerjasama dan Perkotaan			1		1	4	6
12	Bagian Perekonomian			1		3	5	9
13	Bagian Administrasi Pembangunan			1		2	5	8
14	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa					14	12	26

**Tabel 2.2.**  
**Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan**

No	Pimpinan/ Bagian	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	PPPK	Non PNS	Jumlah
1	Sekretaris Daerah				1			1
2	Asisten				3			3
3	Staf Ahli				3			3
4	Bagian Keuangan			7	1	4		12
5	Bagian Umum dan Perengkapan		13	19		18	7	57
6	Bagian Organisasi			5	2	1		8
7	Bagian Humas dan Protokol			10		8	4	22
8	Bagian Pemerintahan		1	6	1	2		10
9	Bagian Kesejahteraan Rakyat			5	1	3	2	11
10	Bagian Hukum			7	3	5		15
11	Bagian Kerjasama dan Perkotaan		1	3	1	1		6
12	Bagian Perekonomian			4	2	3		9
13	Bagian Administrasi Pembangunan			4	1	3		8
14	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			24		2		26

**Tabel 2.3.**  
**Kondisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

No.	Pimpinan/ Bagian	SD	SMP	SMA	D 3	S 1	S 2	S 3	Jumlah
1	Sekretaris Daerah						1		1
2	Asisten						3		3
3	Staf Ahli						3		3
4	Bagian Keuangan			8	1	3			12
5	Bagian Umum dan Perelengkapan	5	2	40	9	1			57
6	Bagian Organisasi			1		6	1		8
7	Bagian Humas dan Protokol			7	2	12	1		22
8	Bagian Pemerintahan			3	1	6			10
9	Bagian Kesejahteraan Rakyat			4		6	1		11
10	Bagian Hukum					11	4		15
11	Bagian Kerjasama dan Perkotaan				1	3	2		6
12	Bagian Perekonomian					7	2		9
13	Bagian Administrasi Pembangunan				2	5	1		8
14	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			3		22	1		26

**Tabel 2.4.**  
**Kondisi Pegawai Berdasarkan Gender**

No.	Pimpinan/ Bagian	Pria	Wanita	Jumlah
1	Sekretaris Daerah	1		1
2	Asisten	2	1	3
3	Staf Ahli	2	1	3
4	Bagian Keuangan	5	7	12
5	Bagian Umum dan Perengkapan	44	13	57
6	Bagian Organisasi		8	8
7	Bagian Humas dan Protokol	11	11	22
8	Bagian Pemerintahan	4	6	10
9	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5	6	11
10	Bagian Hukum	7	8	15
11	Bagian Kerjasama dan Perkotaan	2	4	6
12	Bagian Perekonomian	3	6	9
13	Bagian Administrasi Pembangunan	3	5	8
14	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	13	13	26

#### **2.2.2. Aset**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan. Data sarana dan prasarana Sekretariat Daerah Kota Balikpapan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.5.**  
**SARANA PRASARANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH**

<b>Kode</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>574.603.613.752,47</b>
	Tanah	387.196.653.857,-
	Peralatan dan Mesin	121.696.199.020.57
	Gedung dan Bangunan	50.789.961.350,67
	Jalan, Jaringan dan Irigasi	14.831.072.224,23
	Aset Tetap Lainnya	89.727.300,-
	Konstruksi dalam pekerjaan	-
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>2.771.874.504,-</b>
	Aset Tidak Berwujud	2.250.002.804,-
	Aset lain-lain	521.871.700,-

### **2.3 Kinerja Pelayanan SKPD**

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2021-2026 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD. Untuk Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah dari Tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.6.**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama				97,73 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	102%	100%	100%	N/A	N/A
2	Persentase pemenuhan IKK oleh Perangkat Daerah tepat waktu dan tepat guna				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	N/A	N/A	100%	100%	95%	N/A	N/A
3	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat				90%	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	N/A	N/A	111%	111%	111%	N/A	N/A
4	Persentase Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A
5	Persentase Fasilitasi Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri				70%	82%	83%	83%	84%	100%	100%	90%	N/A	N/A	144%	121%	108%	N/A	N/A
6	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan																		
7	Persentase analisa kebijakan bidang perekonomian dan SDA yang disusun				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A
8	Persentase analisa kebijakan bidang administrasi pembangunan yang disusun				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A
9	IKM Layanan Pengadaan Barang dan Jasa				76,6	77	77,6	78	78,6	80,66	85,21	85,49	N/A	N/A	105%	111%	110%	N/A	N/A
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				78	79	80	81	82	79,32	76,34	76,54	N/A	N/A	102%	97%	96%	N/A	N/A
11	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah				78	78,5	79	79,5	80	75,71	76,05	76,33	N/A	N/A	97%	97%	97%	N/A	N/A
12	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				77	78	79	80	81	81,17	77,17	78,33	N/A	N/A	105%	99%	99%	N/A	N/A
13	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				80	82	85	87	90	80,17	74,83	75,22	N/A	N/A	100%	91%	88%	N/A	N/A
14	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				80	82	85	87	90	79,22	75,83	76,5	N/A	N/A	99%	92%	90%	N/A	N/A

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
15	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				80	82	85	87	90	78,94	75,33	75,05	N/A	N/A	99%	92%	88%	N/A	N/A
16	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80	82	85	87	90	80,78	77,28	76,89	N/A	N/A	101%	94%	90%	N/A	N/A
17	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80	82	85	87	90	79,05	75,33	74,67	N/A	N/A	99%	92%	88%	N/A	N/A
18	Persentase Terpenuhinya Adm Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A
19	Capaian pemenuhan kebutuhan rumah tangga Sekretariat daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A
20	IKM Layanan Penataan Organisasi				81	82	83	84	85	77,22	78,61	79,11	N/A	N/A	95%	96%	95%	N/A	N/A
21	Persentase pelaksanaan fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A



## **2.4 Kelompok Sasaran Layanan Sekretariat Daerah**

Sasaran layanan kerja Sekretariat Daerah adalah tujuan atau hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah dalam memberikan layanan administratif dan koordinatif kepada kepala daerah dan seluruh perangkat daerah, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Sebelum memahami sasarannya, penting diketahui bahwa Sekretariat Daerah bertugas:

- Membantu kepala daerah dalam perumusan kebijakan.
- Mengoordinasikan perangkat daerah.
- Menyediakan dukungan administratif, teknis, dan operasional.

Berikut beberapa sasaran utama layanan Sekretariat Daerah:

1. Terselenggaranya Koordinasi Pemerintahan yang Efektif
  - Memastikan perangkat daerah bekerja selaras dengan visi dan misi kepala daerah.
  - Menjembatani komunikasi antar-dinas dan antar-tingkat pemerintahan (daerah dan pusat).
2. Tersedianya Dukungan Administratif Bagi Kepala Daerah
  - Menyediakan layanan surat-menyurat, agenda, dan dokumentasi kepala daerah secara tertib dan profesional.
  - Mendukung kegiatan pimpinan daerah dalam forum resmi maupun informal.
3. Tersusunnya Kebijakan Daerah yang Terarah dan Terukur
  - Membantu merumuskan, mengkaji, dan menyempurnakan kebijakan strategis.
  - Memonitor pelaksanaan kebijakan agar sesuai dengan peraturan dan rencana pembangunan.
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Pemerintah Daerah
  - Memberikan layanan umum kepada seluruh perangkat daerah (misalnya bagian rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi).
  - Menyediakan sistem informasi dan komunikasi internal yang efisien.
5. Terwujudnya Tertib Administrasi Pemerintahan
  - Menjamin arsip, data, dan dokumen pemerintahan dikelola dengan benar.
  - Mendorong pelaporan dan evaluasi kerja secara berkala.
6. Peningkatan Sinergi dengan Lembaga Eksternal
  - Membangun kerja sama dengan DPRD, instansi vertikal, LSM, media, dan masyarakat.

## **2.5 Mitra Kerja Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah lainnya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing unit kerja Sekretariat daerah perlu bersinergi dan berkolaborasi dengan perangkat kerja lainnya untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas. Mitra kerja Sekretariat Daerah adalah lembaga,

instansi, atau pihak lain yang bekerja sama dengan Sekretariat Daerah (Setda) dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah. Fungsi Mitra Kerja bagi Sekretariat Daerah Yaitu :

1. Koordinatif: Mendukung Setda dalam mengoordinasikan kebijakan lintas dinas dan sektor.
2. Teknis: Memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang masing-masing.
3. Informasional: Menyediakan data dan informasi untuk perumusan kebijakan daerah.
4. Partisipatif: Melibatkan masyarakat atau pihak non-pemerintah dalam pembangunan daerah.

Mitra kerja Sekretariat daerah bisa berasal dari berbagai unsur, antara lain:

1. Instansi Pemerintah Daerah Lain Dinas-dinas teknis dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah.
2. Instansi Vertikal Lembaga pusat yang ada di daerah, seperti Kantor Kementerian, BPK RI, BPKP, BPN, Polri, dan TNI.
3. Lembaga Legislatif Daerah DPRD sebagai mitra dalam penyusunan kebijakan dan anggaran.
4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Mitra dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pelayanan publik.
5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi masyarakat Mitra dalam program-program sosial atau pembangunan partisipatif
6. Lembaga Pendidikan dan Perguruan Tinggi Sebagai mitra penelitian, pelatihan, dan pengembangan kebijakan berbasis data

## **2.6 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu dilakukan untuk menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan dengan memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Uraian permasalahan pembangunan yang diawali dengan analisis isu-isu strategis ini dimaksudkan sebagai acuan untuk merumuskan isu-isu strategis yang menentukan kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam kurun waktu 2025-2029.

Terdapat berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

yang optimal. Pelayanan Sekretariat Daerah yaitu pada lingkup tugas pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah. Lingkup tugas pelayanan Sekretariat Daerah dalam pelaksanaannya menghadapi beberapa permasalahan, seperti :

➤ **Bagian Keuangan**

1. Tata kelola keuangan pada Sekretariat daerah yang belum Optimal sehingga masih terdapat temuan dari BPK/Inpektorat
2. Belum optimalnya proses Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran serta evaluasi kinerja di Sekretariat daerah
3. Penerapan SPIP berbasis Manajemen Resiko pada Sekretariat daerah yang belum Optimal
4. Belum Optimalnya tata kelola arsip dokumen-dokumen keuangan pada bagian keuangan yang disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana gudang arsip
5. keterbatasan Sumber daya Manusia (SDM) pada bagian keuangan serta regulasi keuangan yang berubah-ubah

➤ **Bagian Umum dan Protokol**

1. Sistem manajemen arsip belum dijalankan secara optimal
2. Banyak jumlah kendaraan di Sekretariat yang berusia diatas 5 tahun yang memerlukan anggaran/biaya pemeliharaan yang besar
3. Sistem manajemen pengelolaan administrasi aset di sekretariat daerah belum optimal
4. Keterbatasan Sumber daya Manusia (SDM) pada bagian Humas dan Protokol
5. Belum optimalnya tata kelola arsip dokumen-dokumen kehumasan dan keprotokolan pada bagian Humas dan Protokol karena kurangnya sarana dan prasarana penyimpanan data
6. Belum optimalnya tata kelola aset kehumasan dan keprotokolan (kamera, peralatan studio, perlengkapan upacara, perlengkapan keprotokolan, dll) karena kurangnya sarana dan prasarana tempat penyimpanan dan pencatatan aset
7. Belum optimalnya sarana prasarana bagi fasilitasi notulen rapat

➤ **Bagian Organisasi**

1. Persentase IKM masih perlu ditingkatkan karena terdapat masyarakat yang masih mengeluhkan pelayanan publik yang belum prima seperti terkait kode etik pelayanan publik, penanganan pengaduan publik, sarana prasarana penunjang dan ketepatan waktu pelayanan.
2. Belum optimalnya fasilitasi penyusunan proses bisnis dan standar operasional prosedur
3. Penyesuaian uraian tugas dan fungsi serta organisasi dan tata kerja perangkat daerah perlu dilaksanakan karena ada restrukturisasi tipologi Perangkat Daerah

4. Perlunya perhitungan ulang anjab dan abk serta penataan jabatan pasca restrukturisasi tipologi Perangkat Daerah
  5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat
  6. Laporan Kinerja Perangkat Daerah belum didukung analisis keberhasilan/kegagalan yang andal yang dapat digunakan untuk menerangkan kondisi capaian kinerja serta pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja ke depan belum optimal dilakukan.
- **Bagian Pemerintahan**
1. Belum optimalnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kota dengan pemerintah pusat serta provinsi
  2. Belum optimalnya capaian standar pelayanan minimal yang menjadi pelayanan dasar pemerintah kota
  3. Belum Optimalnya Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dan perlu adanya dukungan
  4. keterbatasan Sumber daya Manusia (SDM) pada bagian Pemerintahan
  5. Belum optimalnya tata kelola arsip
  6. Belum optimalnya tertib batas administrasi wilayah
- **Bagian Kesejahteraan Rakyat**
1. Belum optimalnya fasilitasi pengelolaan hibah pada Bagian Kesra
  2. Belum optimalnya fasilitasi kegiatan Hari Besar keagamaan Islam
  3. Belum Optimalnya tata kelola arsip pada bagian kesra yang disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana gudang arsip
  4. keterbatasan Sumber daya Manusia (SDM) pada bagian Kesra
- **Bagian Hukum**
1. Belum optimalnya penyelesaian perkara dalam hal pembuktian dan saksi
  2. Penilaian atas Laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kota Peduli HAM belum memenuhi standar penilaian yang ditentukan
  3. Belum optimalnya pemetaan jabatan pada Bagian Hukum
  4. Belum optimalnya perencanaan pembentukan produk hukum daerah oleh perangkat daerah
  5. Sering berubahnya regulasi/peraturan yang lebih tinggi sehingga proses penyusunan Produk Hukum Daerah menyesuaikan perkembangan regulasi/peraturan tersebut
  6. Minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi produk hukum daerah
  7. Belum optimalnya tata kelola arsip dokumen dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana
- **Bagian Kerjasama**
1. Belum optimalnya pemetaan rencana kerja sama
  2. Belum terlaksananya evaluasi pelaksanaan kerja sama

3. Belum optimalnya pelaksanaan SOP perjalanan dinas luar negeri dan kerja sama luar negeri
  4. Belum optimalnya tata kelola kearsipan dokumen kerja sama secara digital
- **Bagian Perekonomian**
1. Kurang optimalnya peran BUMD dalam mendukung penyediaan pangan di Daerah
  2. Tidak selarasnya bisnis yang dilaksanakan oleh BUMD dengan kebutuhan masyarakat
  3. Pengelolaan keuangan BUMD yang belum sehat
  4. Angka inflasi belum terkendali
  5. Sering terjadi panic buying di masyarakat
  6. Kurangnya koordinasi dalam pengendalian sarana prasarana penunjang perekonomian
- **Bagian Administrasi Pembangunan**
1. Belum optimalnya proses input realisasi pelaksanaan kegiatan perangkat daerah yang sesuai dengan realisasi di lapangan.
  2. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD yang disebabkan oleh ketidaksesuaian dan ketidaklengkapan data pendukung yang dibutuhkan dalam proses evaluasi.
- **Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**
1. Belum optimalnya pengisian Rencana Umum pengadaan Barang dan Jasa pada OPD
  2. Belum optimalnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan pada Pemangku Kepentingan
  3. Masih kurangnya pemahaman PPK terhadap Pengelolaan Manajemen Kontrak
  4. Masih kurangnya pemahaman PPK terhadap Swakelola
  5. Masih kurangnya pemahaman pelaku pengadaan terhadap Katalog Elektronik
  6. Kurangnya sarana dan prasarana
  7. Masih kurangnya OPD yang memiliki sertifikat PBJ Level 1, PPK tipe C dan belum ada yang memiliki PPK Tipe B dan PPK Tipe A

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan serta permasalahan operasional yang dihadapi oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah, pemetaan permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2.7.**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota**  
**Balikpapan**

Masalah Pokok	Masalah	Penyebab masalah /Akar Masalah
Belum Optimalnya capaian penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah	Belum Optimalnya Peran Sekretariat Daerah dalam hal Fungsi Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi dalam Penyusunan, Pemantauan, serta Evaluasi Kebijakan Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Kurangnya Sinergitas dan Kolaboratif antara unit kerja Sekretariat Daerah dengan Perangkat Daerah dan Mitra Kerja dalam Perumusan Kebijakan yang berkualitas
		Semakin Kompleksnya tuntutan kebijakan yang berkualitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
		Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah perlu didukung dengan berbagai alternatif kebijakan yang inovatif dan dinamis
	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Administratif Sekretariat Daerah	<div>Pelayanan Administratif belum efektif dan efisien serta belum didukung dengan Standar Operasional Prosedure (SOP) yang baik</div> <div>Masih lemahnya pemahaman atas Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) di Lingkungan Sekretariat Daerah</div>

**2.7 Isu Strategis Sekretariat Daerah**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan

pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Dengan penetapan isu strategis diharapkan kualitas pelayanan sebagai fungsi penunjang penyelenggaraan pemerintahan dapat mendukung terwujudnya *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sebagai unsur penunjang bagi Perangkat Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi koordinasi, fasilitasi dalam perumusan kebijakan/ regulasi, penyelesaian permasalahan lintas sektor dan lintas Perangkat Daerah serta memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang diinventarisir dari seluruh sub struktur dibawah rentang kendali Sekretariat akan ditetapkan isu strategis Sekretariat Daerah.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sebagai salah satu perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan lembaga lainnya serta pelayanan administratif, memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian visi dan semua misi pembangunan daerah Kota Balikpapan selama 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sangat terkait erat dengan pencapaian misi ke- 1 yaitu **“Membangun dan mengembaangkan pemerintah yang bersih dan professional yang berorientasi pada pelayanan masyarakat”**.

Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Isu-isu Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sebagai unsur penunjang dalam rangka mewujudkan sasaran tidak terlepas dari isu-isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, isu nasional, dan isu regional). Adapun Isu-isu strategis dalam RPJMD Kota Balikpapan yaitu:

1. Pembangunan Ekonomi Inklusif berkelanjutan
2. Penguatan SDM berdaya saing dan perlindungan social
3. Pengendalian, pengelolaan lingkungan hidup ketahanan bencana
4. Infrastruktur berkualitas terpadu dan penataan utilitas kota
5. Peningkatan kota Cerdas dan nyaman huni
6. Tata Kelola kolaboratif dan innovative
7. Maju sebagai mitra IKN

Perumusan isu-isu strategis Sekretariat daerah tidak bisa lepas dari isu-isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang di hadapi Kota Balikpapan. Adapun Isu Strategis dalam dokumen KHLS Kota Balikpapan yaitu:

1. Ketersediaan air baku
2. Pengendalian emisi GRK
3. Dampak bangkitan Pembangunan IKN
4. Otimalisasi pengelolaan sanitasi, limbah dan sampah
5. Degradasi Kawasan pesisir dan laut
6. Keterbatasan dan kerusakan lahan
7. Kecukupan, keamanan dan pemanfaatan pangan.

Berdasarkan Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Sekretariat Daerah , maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



**Tabel 2.8.**  
**Perumusan Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(Kewenangan PD)	(Sumber dari data capaian kinerja periode sebelumnya) Gap capaian dan ekspektasi	(KLHS RPJMD/Ranwal)	Isu Global	Isu Nasional	Isu Lokal	Kesimpulan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretariat Daerah merupakan perangkat Daerah yang berkedudukan dibawah langsung oleh Walikota Balikpapan sehingga memudahkan dalam hal jalur koordinasi langsung dengan Wali kota.</li> <li>- Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah sebagai jabatan pimpinan tertinggi dalam lingkup pemerintah Daerah yang mempunyai dua peranan yaitu</li> </ul>	1. Kurangnya Sinergitas dan Kolaboratif antara unit kerja Sekretariat Daerah dengan Perangkat Daerah dan Mitra Kerja dalam Perumusan Kebijakan yang berkualitas 2. Semakin Kompleksnya tuntutan kebijakan yang berkualitas dalam penyelenggaraan	Dampak Bangkitan Pembangunan Ibu kota Nusantara (IKN)	Mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance)	Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba (Asta Cita Presiden)	Membangun dan mengembangkan pemerintah yang bersih dan professional yang berorientasi pada pelayanan masyarakat (Misi Walikota Balikpapan)	1. Belum Optimalnya Peran unit kerja Sekretariat Daerah dalam menjalankan Fungsi Koordinasi, Fasilitasi serta Kolaborasi atas Penyusunan, Pemantauan, serta Evaluasi Kebijakan Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(Kewenangan PD)	(Sumber dari data capaian kinerja periode sebelumnya) Gap capaian dan ekspektasi	(KLHS RPJMD/Ranwal)	Isu Global	Isu Nasional	Isu Lokal	Kesimpulan
<p>sebagai Kepala perangkat Daerah (Sekretariat Daerah) dan sekaligus menjadi koordinator perangkat Daerah lainnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.</p> <p>- Tugas utama dari Sekretariat Daerah yaitu membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan Tugas perangkat Daerah pada pemerintah Kota Balikpapan</p>	<p>urusan pemerintah daerah</p> <p>3. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah perlu didukung dengan berbagai alternatif kebijakan yang inovatif dan dinamis</p> <p>4. Pelayanan Administratif belum efektif dan efisien serta belum didukung dengan Standar Operasional Prosedure (SOP) yang baik</p> <p>5. Masih lemahnya pemahaman atas Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) pada Sekretariat Daerah</p>					<p>2. Belum Optimal Pelayanan administratif yang berkualitas pada Sekretariat Daerah untuk mendukung efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah</p>

Sekretariat Daerah Kota Balikpapan melaksanakan berbagai tugas dan fungsi guna mewujudkan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain sinergi penyusunan kebijakan daerah, efektifitas pelaksanaan kebijakan daerah, akuntabilitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah, dan peningkatan manajemen umum di lingkup Sekretariat Daerah. Oleh karena itu terdapat isu-isu strategis yang perlu didorong dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dengan memperhatikan potensi kewenangan perangkat daerah, permasalahan yang dihadapi pada Sekretariat Daerah, isu KLHS yang relevan, dan isu strategis pada lingkup global, nasional, regional yang relevan maka berikut isu-isu strategis pada lingkup Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, yaitu

1. Belum Optimalnya Peran unit kerja Sekretariat Daerah dalam menjalankan Fungsi Koordinasi, Fasilitasi serta Kolaborasi atas Penyusunan, Pemantauan, serta Evaluasi Kebijakan Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
2. Belum Optimalnya Pelayanan administratif yang berkualitas pada Sekretariat Daerah untuk mendukung efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan seperti yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap visi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realitis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan dalam waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai

Sedangkan sasaran adalah target atau hasil yang menggambarkan tercapainya tujuan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Sasaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Rumusan sasaran memperhatikan kriteria *specific, measureable, achievable, relevant, time bond*, dan *continously improve* (SMART-C).

Perumusan tujuan dan sasaran rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tidak boleh bertentangan dengan dan harus mendukung tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan beserta indikator kinerjanya Dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DO	Formulasi	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4			-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
<b>4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH</b>													
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Dukungan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Nilai Reformasi Birokrasi General (Nilai)	Ukuran yang menunjukkan tingkat capaian perbaikan tata kelola pemerintahan secara sistemik dan lintas sektor melalui pelaksanaan kebijakan yang diarahkan untuk menyelesaikan akar permasalahan umum birokrasi, seperti tumpang tindih regulasi dan kewenangan, lemahnya koordinasi, serta mendorong konsistensi kebijakan dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.	Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	69,96	69,98	70,18	70,28	70,38	70,48	70,58	Sumber Data: Bagian Organisasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DO	Formulasi	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4			-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Nilai Reformasi Birokrasi Tematik (Nilai)	Ukuran yang menunjukkan tingkat pencapaian perbaikan tata kelola pemerintahan yang difokuskan pada penyelesaian permasalahan hilir secara lintas sektor untuk mendukung percepatan agenda prioritas pembangunan nasional, melalui pelaksanaan kebijakan yang diarahkan untuk mengurai dan mengatasi akar persoalan tata kelola ( <i>debottlenecking</i> ) sesuai tema yang telah ditetapkan pada tingkat makro	Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	8,32	8,32	8,34	8,36	8,38	8,4	8,42	Sumber Data: Bagian Organisasi
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melalui kualitas kebijakan yang adaptif dan	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Nilai)	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat	Nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Dihitung oleh Kementerian Dalam Negeri)	3.25	3.7018	3.703	3.704	3.705	3.706	3.707	Sumber Data: Bagian Pemerintahan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DO	Formulasi	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4			-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		sinergi		capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.									
			Persentase Kerja Sama Daerah yang Ditindaklanjuti (%)	Ukuran yang menunjukkan sejauh mana efektifitas dokumen kerja sama yang ditindaklanjuti	(Jumlah perjanjian kerja sama / Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati(MoU) ) x 100 %	90	90.2	90.4	90.6	90.8	91	91.2	Sumber Data: Bagian Kerjasama dan Perkotaan
			Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Ditetapkan (%)	Ukuran yang menunjukkan sejauh mana efektifitas rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditetapkan	(Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditetapkan / Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi) x 100%	90	90.2	90.4	90.6	90.8	91	91.2	Sumber Data: Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Indeks Reformasi Hukum (Poin)	Ukuran efektifitas dan capaian pelaksanaan reformasi hukum oleh instansi pemerintah	Nilai Yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum (DIhitung oleh Kemenhuk)	98.32	98.35	98.4	98.45	98.5	98.55	98.6	Sumber Data: Bagian Hukum
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan melalui kualitas	Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti (%)	Ukuran yang menunjukkan sejauh mana efektifitas rumusan kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	(Jumlah kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti / Jumlah kebijakan perekonomian daerah yang difasilitasi )x 100%	100	100	100	100	100	100	100	Sumber Data: Bagian Perekonomian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DO	Formulasi	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4			-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		kebijakan yang dinamis dan inovatif	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Poin)	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat kematangan kepatuhan dan efektifitas sistem pengelolaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah	Nilai yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (Dihitung oleh LKPP)	73.70	74	74.1	74.2	74.3	74.4	74.5	Sumber Data: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Persentase Rata-Rata Capaian Realisasi Fisik Kota Balikpapan (%)	Tingkat kemampuan Perangkat Daerah dalam menyelesaikan kegiatan yang telah direncanakan	Hasil Realisasi Fisik SIPERANGKO (Nilai total capaian realisasi fisik per perangkat daerah / jumlah perangkat daerah )	96.49	96,5	96.6	96.65	96.7	96.75	96.8	Sumber Data: Bagian Administrasi Pemerintahan



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DO	Formulasi	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4			-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah dan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah	Nilai AKIP Kota Balikpapan Komponen Pelaporan (Nilai)	Ukuran capaian kinerja pemerintah daerah dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang memuat informasi hasil pengukuran kinerja secara lengkap, tepat waktu, akurat, konsisten, serta sesuai format dan ketentuan yang berlaku. Penilaian meliputi kelengkapan isi laporan, kesesuaian dengan perencanaan, kejelasan analisis capaian kinerja, penggunaan indikator yang terukur, penyajian data pendukung yang valid, dan pemanfaatannya untuk perbaikan kinerja.	Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	9,48	9,72	9,82	9,89	9,96	10,03	10,1	Sumber Data: Bagian Organisasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DO	Formulasi	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4			-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan seberapa baik perangkat daerah tersebut dalam merencanakan melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya.	Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan seberapa baik perangkat daerah tersebut dalam merencanakan melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya.	76.33	77,03	77.5	77.8	78	78.3	78.8	Sumber Data: Bagian Keuangan

Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 tersebut diatas dapat menunjukkan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

### **3.2 Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategis Renstra Sekretariat Daerah 2025-2029 merupakan rencana Tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah Upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus dan penentuan program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/ sasaran Renstra Sekretariat Daerah. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang,
2. Didasarkan pada capaian kinerja pembangunan,
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan
4. Terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu, perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada

tahap perumusan masalah. Penahapan rencana strategis Sekretariat daerah Kota Balikpapan dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 3.2**  
**Penahapan rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan**

<b>Tahap I (2026)</b>	<b>Tahap II (2027)</b>	<b>Tahap III (2028)</b>	<b>Tahap IV (2029)</b>	<b>Tahap V (2030)</b>
Penguatan aspek kelembagaan Sekretariat Daerah	Peningkatan kapasitas Aparatur Sumber Daya Manusia dalam penyusunan Kebijakan yang berkualitas	Akselerasi pengkoordinasian lintas Sektor dalam perumusan kebijakan daerah	Pemantapan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	Kesinambungan Aspek kelembagaan, Sumber daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta pengkoordinasian lintas sektoral dalam meningkatkan kualitas kebijakan daerah

Arah kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029. Strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan

target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

Rumusan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dapat dilihat pada table sebagai berikut.

**Tabel 3.3**  
**Rumusan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah**

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Sekretariat Daerah	Arah Kebijakan Unit Kerja Sekretariat Daerah
1	Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang menjadi kewenangan Daerah	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan kolaboratif, serta pelayanan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Peran Unit-Unit Kerja pada Sekretariat Daerah dalam Perumusan, Pemantauan serta Evaluasi Kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi serta kolaborasi antar perangkat Daerah dalam perumusan kebijakan yang berkualitas dan komprehensif serta didukung dengan data yang handal</li> <li>2. Penguatan Sistem akuntabilitas Kinerja (SAKIP) pada Sekretariat Daerah</li> <li>3. Penguatan Kapasitas Aparatur (SDM) terhadap Layanan Sekretariat Daerah</li> </ol>	<p>➤ <b>Bagian Keuangan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penguatan tata kelola keuangan yang bersih dan transparan dengan penerapan aplikasi SIPD</li> <li>2 Fasilitasi dan koordinasi dengan stakeholder (SKPD Teknis dan Seluruh Bagian Setda) secara berkala terhadap proses pelaksanaan perencanaan, penganggaran serta evaluasi kinerja serta penerapan SPIP berbasis resiko di lingkungan Sekretariat Daerah</li> <li>3 Peningkatan sarana dan prasana dalam tata kelola arsip dokumen keuangan</li> <li>4 peningkatan kapasitas Aparatur dengan Bimbingan Teknis Pengelolaan keuangan daerah</li> </ol> <p>➤ <b>Bagian Umum dan Protokol</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Peningkatan kualitas pelayanan kedinasan dan rumah tangga kepala</li> </ol>

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Sekretariat Daerah	Arah Kebijakan Unit Kerja Sekretariat Daerah
			4. Peningkatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas Sekretariat daerah	<p>daerah dan wakil kepala daerah</p> <p>2 peningkatan kualitas pelayanan sekretariat daerah dan tamu dinas</p> <p>3 Peningkatan Kualitas administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah</p> <p>4 Peningkatan kualitas penataan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</p> <p>5 Peningkatan kapasitas SDM melalui Bimbingan Teknis, Pelatihan untuk SDM kehumasan dan keprotokolan.</p> <p>6 Peningkatan sarana dan prasarana tata kelola arsip kehumasan dan keprotokolan</p> <p>7 Peningkatan sarana dan prasarana serta SDM dalam pengelolaan penyimpanan dan pencatatan aset kehumasan dan keprotokolan.</p> <p>8 Peningkatan sarana dan prasarana fasilitasi notulen rapat</p>

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Sekretariat Daerah	Arah Kebijakan Unit Kerja Sekretariat Daerah
				<p>➤ <b>Bagian Organisasi</b></p> <p>1 Pelaksanaan peningkatan kualitas layanan yang dilakukan dengan mengkoordinasikan perbaikan kode etik pelayanan publik, penguatan sistem pengaduan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta penerapan waktu pelayanan, melalui penyusunan kebijakan, standar operasional, dan pemantauan rutin untuk mendukung perbaikan berkelanjutan.</p> <p>2 Penguatan kapasitas pendampingan teknis, optimalisasi pendampingan terjadwal serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.</p> <p>3 Pelaksanaan reviu dan harmonisasi uraian tugas, fungsi, serta struktur organisasi dan tata kerja berdasarkan hasil restrukturisasi tipologi Perangkat Daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kebutuhan aktual organisasi.</p>



No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Sekretariat Daerah	Arah Kebijakan Unit Kerja Sekretariat Daerah
				<p>4 Pendampingan perhitungan anjab dan abk serta penataan jabatan dengan memperhatikan kebutuhan aktual organisasi.</p> <p>5 Pelaksanaan peningkatan komitmen pimpinan, efektivitas unit kerja Reformasi Birokrasi, pemilihan program prioritas yang tepat, pengelolaan manajemen Reformasi Birokrasi secara efektif, serta melibatkan masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.</p> <p>6 Penyempurnaan sistem pelaporan kinerja dengan menyertakan analisis pencapaian yang komprehensif, serta pemanfaatan hasil laporan untuk evaluasi dan perbaikan perencanaan kinerja, melalui peningkatan kapasitas SDM dan sistem monitoring yang terintegrasi.</p> <p>➤ <b>Bagian Pemerintahan</b></p> <p>1 penguatan dalam strategi penyusunan kebijakan pemerintah kota</p>

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Sekretariat Daerah	Arah Kebijakan Unit Kerja Sekretariat Daerah
				<p>2 penguatan kordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah untuk tercapainya pelayanan dasar yang optimal sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan</p> <p>3 penguatan Koordinasi dan Komunikasi dengan Perangkat Daerah agar nilai LPPD semakin meningkat sesuai dengan arah kebijakan yang di tetapkan</p> <p>4 peningkatan kapasitas Aparatur dengan Bimbingan Teknis</p> <p>5 Peningkatan sarana dan prasana dalam tata kelola arsip dokumen</p> <p>6 Pelaksanaan tertib batas administrasi wilayah melalui penataan batas wilayah</p> <p>➤ <b>Bagian Kesejahteraan Rakyat</b></p> <p>1 Peningkatan kemampuan aparatur dengan Bimtek pengelolaan hibah</p> <p>2 peningkatan sarana dan prasana dalam tata kelola arsip dokumen</p> <p>3 peningkatan kapasitas Aparatur dengan Bimbingan Teknis</p>

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Sekretariat Daerah	Arah Kebijakan Unit Kerja Sekretariat Daerah
				<p>➤ <b>Bagian Hukum</b></p> <p>1 Edukasi kepada perangkat daerah tentang pentingnya keterlibatan para pihak yang berperkara dalam penyediaan bahan dan bukti sidang guna memperlancar proses di persidangan</p> <p>2 Peningkatan koordinasi dalam tata kelola arsip dokumen</p> <p>3 Peningkatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas fasilitasi pemberian bantuan hukum</p> <p>4 Pemberian penghargaan kepada perangkat daerah yang aktif dalam mendukung pelaporan Aksi HAM dan Kota Peduli HAM</p> <p>5 Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi data antar perangkat daerah dan lintas instansi vertikal</p> <p>6 Pengusulan kebutuhan jabatan sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Hukum</p> <p>7 Peningkatan koordinasi dan peran aktif perangkat daerah dalam menyusun</p>

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Sekretariat Daerah	Arah Kebijakan Unit Kerja Sekretariat Daerah
				<p>perencanaan produk hukum daerah</p> <p>8 Peningkatan sarana dan prasana dalam tata kelola arsip dokumen hukum dan pengelolaan JDIH</p> <p>9 Peningkatan koordinasi dan peran aktif kepada perangkat daerah terkait pengelolaan JDIH</p> <p>➤ <b>Bagian Kerjasama</b></p> <p>1 Optimalisasi pemetaan rencana kerja sama bersama OPD</p> <p>2 Peningkatan Koordinasi dengan OPD terkait pelaksanaan kerja sama melalui perjanjian kerja sama yang telah dilaksanakan</p> <p>3 Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi bagi seluruh OPD terkait pelaksanaan PDLN dan kerja sama luar negeri</p> <p>➤ <b>Bagian Perekonomian</b></p> <p>1 Penguatan sistem tata kelola BUMD</p> <p>2 Fasilitasi analisa kebijakan potensi bisnis BUMD</p>

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Sekretariat Daerah	Arah Kebijakan Unit Kerja Sekretariat Daerah
				<p>3 Fasilitasi pengawasan internal BUMD dalam pengelolaan keuangan dan pemenuhan target kinerja</p> <p>4 Fasilitasi koordinasi pihak-pihak yang mempengaruhi laju inflasi</p> <p>5 Memberikan edukasi dalam berbelanja bahan kebutuhan pokok</p> <p>6 Fasilitasi koordinasi pihak-pihak penunjang perekonomian</p> <p>➤ <b>Bagian Administrasi Pembangunan</b></p> <p>1 Optimalisasi peran Bagian Administrasi Pembangunan dalam monitoring dan evaluasi, dan fasilitasi serta koordinasi dengan SKPD terkait secara berkala.</p> <p>2 Optimalisasi melalui pemanfaatan data yang valid dan memperkuat koordinasi antar perangkat daerah.</p> <p>➤ <b>Bagian Pengadaan Barang dan jasa</b></p> <p>1 Optimalisasi Kuantitas dan Kualitas Rencana Umum Pengadaan Kota Balikpapan melalui</p>

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Sekretariat Daerah	Arah Kebijakan Unit Kerja Sekretariat Daerah
				<p>sosialisasi/bimtek/ondesk</p> <p>2 Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pengadaan melalui sosialisasi/bimtek/ondesk</p> <p>3 Optimalisasi Pemahaman PPK terhadap Pengelolaan Manajemen Kontrak</p> <p>4 Optimalisasi Pemahaman Swakelola</p> <p>5 Optimalisasi Pemahaman pelaku pengadaan terhadap Katalog Elektronik</p> <p>6 Pelaksanaan Diklat PBJ Level 1, PPK tipe C, PPK Tipe B dan PPK Tipe A</p>

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1 Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan**

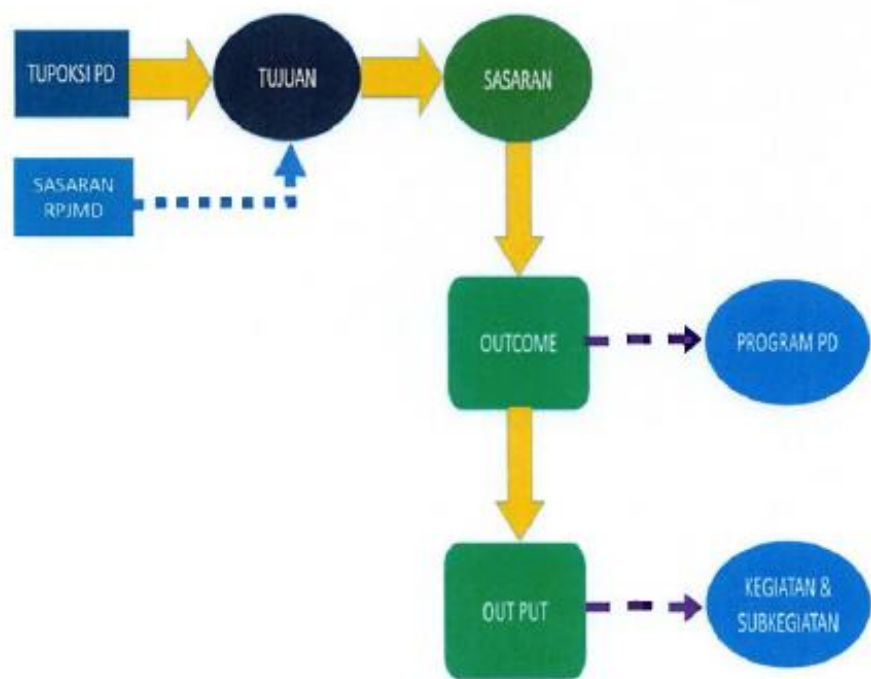
Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut, maka diperlukan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan yang berdasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Rencana program dilengkapi dengan indikator atau *outcome* program beserta target capaiannya dan pagu indikatif yang mencerminkan kebutuhan anggaran dalam melaksanakan program yang direncanakan. Sedangkan untuk rencana kegiatan juga dilengkapi dengan indikator atau *output* kegiatan beserta target capainnya dan pagu indikatif. Indikator atau *outcome* program merupakan suatu keluaran yang dapat langsung digunakan atau hasil nyata dari suatu keluaran dan juga mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program- program yang tertuang dalam visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan menyusun Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

Program, kegiatan, sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output dan telah mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam peraturan Menteri dalam negeri beserta pemukhtahirannya. Daftar program, kegiatan dan sub kegiatan pada renstra 2025-2029 merupakan bagian dari Upaya menjaga kesinambungan perencanaan secretariat daerah yaitu pijakan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah hingan tahun 2030.

**Gambar 4.1**  
**Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**  
**Renstra Sekretariat Daerah**



Adapun Rumusan Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 secara rinci tertuang dalam tabel 4.1 sebagai berikut :



**Tabel 4.1**  
**Rumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatn	Keterangan
Membangun dan mengembangkan pemerintah yang bersih dan professional yang berorientasi pada pelayanan masyarakat (Misi ke 1 )	Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas				Indeks Reformasi Birokrasi		Tujuan RPJMD 2025-2029
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel			Nilai SAKIP Daerah		Sasaran RPJMD 2025-2029
	Meningkatn ya dukungan tata kelola pemerintahan yang berkualitas				1. Nilai Reformasi Birokrasi General 2. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik		Tujuan Sekretaria t Daerah 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kualitas Kebijakan Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			Skor LPPD Kota Balikpapan		Sasaran Sekretariat Daerah 2025-2029
					Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti		
					Presentase Rumusan kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang di tetapkan		
					Indeks Reformasi Hukum		
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat		Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan yang difasilitasi (%)	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Program
					Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Ditindaklanjuti (Poin)		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
					Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang Difasilitasi (%)		
					Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Kegiatan Kerja Sama yang Ditindaklanjuti (%)		
				Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi terkait Administrasi Tata Pemerintahan		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Kegiatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
					Jumlah dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	<b>Sub Kegiatan</b>
					Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	<b>Sub Kegiatan</b>
					Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	<b>Sub Kegiatan</b>
				<b>Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>		<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Kegiatan</b>
					Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	<b>Sub Kegiatan</b>

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatn	Keterangan
					Jumlah dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	<b>Sub Kegiatan</b>

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
					Jumlah dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	<b>Sub Kegiatan</b>
				<b>Terlaksananya Tindaklanjut Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>		<b>Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Kegiatan</b>
					Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	<b>Sub Kegiatan</b>
					Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	<b>Sub Kegiatan</b>

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
					Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Sub Kegiatan
				Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Kerjasama Daerah		Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kegiatan
					Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Sub Kegiatan
					Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Sub Kegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Sub Kegiatan
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kualitas			Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti (%)		Sasaran Sekretariat Daerah 2025-2029
					Indeks Tata Kelola Pengadaan (Poin)		

<b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program / Kegiatan / Subkegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
		<b>Kebijakan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan</b>			<b>Persentase Rata-Rata Capaian Realisasi Fisik Kota Balikpapan (%)</b>		
			<b>Meningkatnya Kualitas kebijakan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan</b>		<b>Persentase Fasilitasi Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti (%)</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Program</b>
					<b>Persentase Fasilitasi Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang Ditindaklanjuti (%)</b>		
					<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (Poin)</b>		
				<b>Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Perekonomian</b>		<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Kegiatan</b>



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
					Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	<b>Sub Kegiatan</b>
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	<b>Sub Kegiatan</b>
					Jumlah dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	<b>Sub Kegiatan</b>
				<b>Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi terkait Administrasi Pembangunan</b>		<b>Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Kegiatan</b>
					Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	<b>Sub Kegiatan</b>

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	<b>Sub Kegiatan</b>
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	<b>Sub Kegiatan</b>
				<b>Meningkatnya kualitas layanan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>		<b>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Kegiatan</b>
					Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	<b>Sub Kegiatan</b>
					Jumlah dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	<b>Sub Kegiatan</b>
					Jumlah Pembinaan kepada Pelaku Pengadaan	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	<b>Sub Kegiatan</b>
		<b>Meningkatnya Kualitas</b>			<b>Nilai SAKIP Sekretariat Daerah</b>		<b>Sasaran Sekretaria</b>

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatn	Keterangan
		Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah dan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah			Nilai AKIP Kota Balikpapan Komponen Pelaporan		t Daerah 2025-2029
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Program
					IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Poin)		
					Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja (Nilai)		
					Indeks Kematangan Organisasi (Poin)		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Tersedianya indikator kinerja yang relevan, terukur dan selaras dari tingkat individu hingga organisasi		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan
					Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan
					Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>Sub Kegiatan</b>
				<b>Laporan realisasi anggaran perangkat daerah secara berkala dan akuntabel</b>		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kegiatan</b>
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>Sub Kegiatan</b>
					Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<b>Sub Kegiatan</b>

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	<b>Sub Kegiatan</b>
				<b>Data dan Dokumen Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tertib dan akuntabel</b>		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kegiatan</b>
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	<b>Sub Kegiatan</b>
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<b>Sub Kegiatan</b>

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Laporan pelaksanaan administrasi umum dan pengelolaan sarana perkantoran yang efektif dan efisien		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub Kegiatan
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<b>Sub Kegiatan</b>
					Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<b>Sub Kegiatan</b>
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	<b>Sub Kegiatan</b>
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>Sub Kegiatan</b>
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	<b>Sub Kegiatan</b>



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan sesuai spesifikasi dan kebutuhan perangkat daerah		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Sub Kegiatan
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Pengadaan Aset Tak Berwujud	<b>Sub Kegiatan</b>
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<b>Sub Kegiatan</b>
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<b>Sub Kegiatan</b>
				Laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kegiatan</b>
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<b>Sub Kegiatan</b>

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>Sub Kegiatan</b>
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<b>Sub Kegiatan</b>
				<b>Barang milik daerah dalam kondisi baik dan fungsional melalui kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala</b>		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kegiatan</b>
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<b>sub Kegiatan</b>

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<b>sub Kegiatan</b>
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	<b>sub Kegiatan</b>
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>sub Kegiatan</b>
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	<b>sub Kegiatan</b>
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<b>sub Kegiatan</b>

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<b>sub Kegiatan</b>
				<b>Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Kegiatan</b>
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<b>Sub Kegiatan</b>
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<b>Sub Kegiatan</b>

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
					Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<b>Sub Kegiatan</b>
				<b>Terpenuhinya kebutuhan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>		<b>Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Kegiatan</b>
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	<b>Sub Kegiatan</b>
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	<b>Sub Kegiatan</b>
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	<b>Sub Kegiatan</b>

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
				Terlaksananya Penataan Organisasi yang efektif dan adaptif		Kegiatan Penataan Organisasi	Kegiatan
					Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sub Kegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sub Kegiatan
					Jumlah dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sub Kegiatan
					Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sub Kegiatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
					Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan
				Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi Keprotokolan	Sub Kegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Sub Kegiatan
					Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Sub Kegiatan



Pendanaan dalam proses perencanaan Rencana Strategis (Renstra) memegang peranan krusial karena menentukan sejauh mana program dan kegiatan strategis dapat direalisasikan secara efektif. Pada tahap ini, alokasi sumber daya keuangan harus disesuaikan dengan visi, misi, serta tujuan jangka menengah Pemerintah Kota Balikpapan. Proses pendanaan dilakukan secara terstruktur melalui identifikasi kebutuhan pendanaan setiap program kegiatan serta sub kegiatan, pemetaan sumber pembiayaan (baik dari APBN/APBD, hibah, maupun sumber lainnya), dan penyusunan kerangka pendanaan yang realistis dan berkelanjutan. Pendanaan yang tepat dalam Renstra bukan hanya mencerminkan kemampuan fiskal, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap pencapaian target kinerja dan peningkatan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, integrasi antara perencanaan strategis dan penganggaran menjadi kunci dalam memastikan efektivitas implementasi Renstra secara menyeluruh

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan Sekretariat Daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2  
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaannya

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				183.424.592.00 0		188.927.330.00 0		198.373.697.00 0		202.341.171.00 0		208.411.406.00 0	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				133.498.807.43 6		137.503.765.00 0		144.378.947.00 0		147.266.517.00 0		151.654.574.75 4	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Poin)	40	41	133.498.807.43 6	42	137.503.765.00 0	43	144.378.947.00 0	44	147.266.517.00 0	45	151.654.574.75 4	4.01.0.00.0.00.01.00 00 - SEKRETARIAT DAERAH
	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Poin)	78,33	78,5		79		79,5		79,8		80		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	76,54	77		77,3		77,5		77,8		78		
	Nilai AKIP Perangkat Daerah Komponen Perencanaan	23,63	24,2		24,5		24,7		25		25,5		
	Nilai AKIP Perangkat Daerah Komponen Perencanaan	23,63	24,2		24,5		24,7		25		25,5		4.01.0.00.0.00.01.00 01 - Bagian Keuangan

	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Poin)	78,33	78,5		79		79,5		79,8		80		
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				410.000.000		600.000.000		750.000.000		880.000.000		1.000.000.000	
Tersedianya indikator kinerja yang relevan, terukur dan selaras dari tingkat individu hingga organisasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	410.000.000	3	600.000.000	3	750.000.000	3	880.000.000	3	1.000.000.000	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3	6		6		6		6		6		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6		6		6		6		6		
4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	100.000.000	3	150.000.000	3	200.000.000	3	250.000.000	3	300.000.000	
4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				160.000.000		200.000.000		250.000.000		280.000.000		300.000.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3	6	160.000.000	6	200.000.000	6	250.000.000	6	280.000.000	6	300.000.000	
4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				150.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000	

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6	150.000.000	6	250.000.000	6	300.000.000	6	350.000.000	6	400.000.000	
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				37.927.588.000		38.887.703.391		40.712.076.500		41.411.298.750		42.530.083.754	
Laporan realisasi anggaran perangkat daerah secara berkala dan akuntabel	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.944	3.000	37.927.588.000	3.100	38.887.703.391	3.200	40.712.076.500	3.300	41.411.298.750	3.400	42.530.083.754	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	139	185		210		215		220		230		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	60	61		61		61		61		61		
4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				37.517.588.000		38.337.703.391		40.062.076.500		40.681.298.750		41.730.083.754	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	139	185	37.517.588.000	210	38.337.703.391	215	40.062.076.500	220	40.681.298.750	230	41.730.083.754	
4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				280.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000	

Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.944	3.000	280.000.000	3.100	350.000.000	3.200	400.000.000	3.300	450.000.000	3.400	500.000.000	
4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				130.000.000		200.000.000		250.000.000		280.000.000		300.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	60	61	130.000.000	61	200.000.000	61	250.000.000	61	280.000.000	61	300.000.000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Poin)	40	41	133.498.807.43 <sub>6</sub>	42	137.503.765.00 <sub>0</sub>	43	144.378.947.00 <sub>0</sub>	44	147.266.517.00 <sub>0</sub>	45	151.654.574.75 <sub>4</sub>	4.01.0.00.0.00.01.00 04 - Bagian Organisasi
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi				884.428.822		910.965.000		956.515.000		975.648.000		1.004.920.000	
Terlaksananya Penataan Organisasi yang efektif dan adaptif	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1	6	884.428.822	5	910.965.000	5	956.515.000	5	975.648.000	5	1.004.920.000	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		

	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	1	40		40		40		40		41		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	1	4		1		1		1		1		
4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				215.549.917		222.017.000		233.118.000		237.781.000		244.915.000	
Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	1	40	215.549.917	40	222.017.000	40	233.118.000	40	237.781.000	41	244.915.000	
4.01.01.2.13.0002 - Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				222.171.805		228.837.000		240.279.000		245.085.000		252.438.000	
Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	1	4	222.171.805	1	228.837.000	1	240.279.000	1	245.085.000	1	252.438.000	
4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				87.677.881		90.309.000		94.825.000		96.722.000		99.624.000	
Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1	6	87.677.881	5	90.309.000	5	94.825.000	5	96.722.000	5	99.624.000	
4.01.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				200.379.625		206.392.000		216.712.000		221.047.000		227.679.000	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	1	1	200.379.625	1	206.392.000	1	216.712.000	1	221.047.000	1	227.679.000	

4.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				158.649.594		163.410.000		171.581.000		175.013.000		180.264.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	2	158.649.594	2	163.410.000	2	171.581.000	2	175.013.000	2	180.264.000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	76,54	77		77,3		77,5		77,8		78		4.01.0.00.0.00.01.00 09 - Bagian Umum dan Perengkapan
4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				3.028.591.390		3.119.450.000		3.275.423.000		3.340.932.000		3.441.162.000	
Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4	4	3.028.591.390	4	3.119.450.000	4	3.275.423.000	4	3.340.932.000	4	3.441.162.000	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan (Laporan)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	4	4		4		4		4		4		
4.01.01.2.14.0001 - Fasilitas Keprotokolan				1.058.000.000		1.089.740.000		1.144.227.000		1.167.112.000		1.202.126.000	
Terlaksananya Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan (Laporan)	4	4	1.058.000.000	4	1.089.740.000	4	1.144.227.000	4	1.167.112.000	4	1.202.126.000	
4.01.01.2.14.0002 - Fasilitas Komunikasi Pimpinan				1.052.888.992		1.084.476.000		1.138.700.000		1.161.474.000		1.196.319.000	
Terlaksananya Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4	4	1.052.888.992	4	1.084.476.000	4	1.138.700.000	4	1.161.474.000	4	1.196.319.000	
4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan				917.702.398		945.234.000		992.496.000		1.012.346.000		1.042.717.000	

Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	4	4	917.702.398	4	945.234.000	4	992.496.000	4	1.012.346.000	4	1.042.717.000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	76,54	77	133.498.807.43 <sub>6</sub>	77,3	137.503.765.00 <sub>0</sub>	77,5	144.378.947.00 <sub>0</sub>	77,8	147.266.517.00 <sub>0</sub>	78	151.654.574.75 <sub>4</sub>	4.01.0.00.0.00.01.00 10 - Bagian Umum dan Perengkapan
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				625.000.000		643.750.000		675.937.500		689.456.250		710.141.000	
Data dan Dokumen Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tertib dan akuntabel	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	1	625.000.000	1	643.750.000	1	675.937.500	1	689.456.250	1	710.141.000	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	8	8		8		8		8		8		
4.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				25.000.000		25.750.000		27.037.500		27.578.250		28.406.000	
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	1	25.000.000	1	25.750.000	1	27.037.500	1	27.578.250	1	28.406.000	
4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				600.000.000		618.000.000		648.900.000		661.878.000		681.735.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	8	8	600.000.000	8	618.000.000	8	648.900.000	8	661.878.000	8	681.735.000	
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				39.914.160.785		41.111.585.609		43.167.167.000		44.030.514.000		45.351.433.000	
Laporan pelaksanaan administrasi umum dan pengelolaan sarana perkantoran yang efektif dan efisien	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	39.914.160.785	12	41.111.585.609	12	43.167.167.000	12	44.030.514.000	12	45.351.433.000	



	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	-	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	60		60		60		60		60		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	7		7		7		7		7		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	5		5		5		5		5		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.429	1.100		1.200		1.400		1.600		1.800		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	5		5		5		5		5		
4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				750.000.000		772.500.000		811.125.000		827.348.000		852.169.000	

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1	750.000.000	1	772.500.000	1	811.125.000	1	827.348.000	1	852.169.000	
4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.650.000.000		3.759.500.000		3.947.475.000		4.026.425.000		4.147.218.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	7	3.650.000.000	7	3.759.500.000	7	3.947.475.000	7	4.026.425.000	7	4.147.218.000	
4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.500.000.000		1.545.000.000		1.622.250.000		1.654.695.000		1.704.336.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	5	1.500.000.000	5	1.545.000.000	5	1.622.250.000	5	1.654.695.000	5	1.704.336.000	
4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.646.540.00 0		13.025.936.20 0		13.677.234.00 0		13.950.779.00 0		14.369.303.00 0	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	5	12.646.540.00 0	5	13.025.936.20 0	5	13.677.234.00 0	5	13.950.779.00 0	5	14.369.303.00 0	
4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				677.797.325		698.131.245		733.038.000		747.699.000		770.130.000	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	677.797.325	2	698.131.245	2	733.038.000	2	747.699.000	2	770.130.000	
4.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				450.000.000		463.500.000		486.675.000		496.409.000		511.302.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	60	450.000.000	60	463.500.000	60	486.675.000	60	496.409.000	60	511.302.000	
4.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				12.735.143.026		13.117.197.317		13.773.058.000		14.048.520.000		14.469.976.000	

Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	12.735.143.026	12	13.117.197.317	12	13.773.058.000	12	14.048.520.000	12	14.469.976.000	
4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.454.680.434		7.678.320.847		8.062.237.000		8.223.482.000		8.470.187.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.429	1.100	7.454.680.434	1.200	7.678.320.847	1.400	8.062.237.000	1.600	8.223.482.000	1.800	8.470.187.000	
4.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				50.000.000		51.500.000		54.075.000		55.157.000		56.812.000	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	-	1	50.000.000	1	51.500.000	1	54.075.000	1	55.157.000	1	56.812.000	
4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4.600.000.000		4.738.000.000		4.974.900.000		5.074.398.000		5.226.631.000	
Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan sesuai spesifikasi dan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	0	4.600.000.000	1	4.738.000.000	1	4.974.900.000	1	5.074.398.000	1	5.226.631.000	
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	44	50		50		50		50		50		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	21	0		3		3		3		3		

	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3		3		3		3		3		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	50		50		50		50		50		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2	13		13		13		13		13		
4.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.750.000.000		1.500.000.000		1.575.000.000		1.606.500.000		1.654.695.000	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2	13	1.750.000.000	13	1.500.000.000	13	1.575.000.000	13	1.606.500.000	13	1.654.695.000	
4.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		723.000.000		759.150.000		774.333.000		797.563.000	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	0	0	1	723.000.000	1	759.150.000	1	774.333.000	1	797.563.000	
4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				500.000.000		250.000.000		262.500.000		267.750.000		275.783.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	44	50	500.000.000	50	250.000.000	50	262.500.000	50	267.750.000	50	275.783.000	
4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.250.000.000		1.000.000.000		1.050.000.000		1.071.000.000		1.103.130.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	50	1.250.000.000	50	1.000.000.000	50	1.050.000.000	50	1.071.000.000	50	1.103.130.000	
4.01.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		15.000.000		15.750.000		16.065.000		16.547.000	

Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	15.000.000	1	15.750.000	1	16.065.000	1	16.547.000	
4.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		250.000.000		262.500.000		267.750.000		275.783.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	21	0	0	3	250.000.000	3	262.500.000	3	267.750.000	3	275.783.000	
4.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.100.000.000		1.000.000.000		1.050.000.000		1.071.000.000		1.103.130.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3	1.100.000.000	3	1.000.000.000	3	1.050.000.000	3	1.071.000.000	3	1.103.130.000	
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				28.847.113.985		29.712.528.000		31.198.155.000		31.822.119.000		32.776.784.000	
Laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	28.847.113.985	12	29.712.528.000	12	31.198.155.000	12	31.822.119.000	12	32.776.784.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	36		36		36		36		36		
4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3.400.000.000		3.502.000.000		3.677.100.000		3.750.642.000		3.863.162.000	

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	36	3.400.000.000	36	3.502.000.000	36	3.677.100.000	36	3.750.642.000	36	3.863.162.000	
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				25.447.113.985		26.210.528.000		27.521.055.000		28.071.477.000		28.913.622.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	25.447.113.985	12	26.210.528.000	12	27.521.055.000	12	28.071.477.000	12	28.913.622.000	
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12.860.000.000		13.245.800.000		13.908.090.000		14.186.252.000		14.611.842.000	
Barang milik daerah dalam kondisi baik dan fungsional melalui kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12	20	12.860.000.000	20	13.245.800.000	20	13.908.090.000	20	14.186.252.000	20	14.611.842.000	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	9	3		3		3		3		3		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	843	350		350		350		350		350		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	50	100		100		100		100		100		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	152	155		155		155		155		155		

	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	3		3		3		3		3		
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	0		1		1		1		1		
4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.500.000.000		1.545.000.000		1.622.250.000		1.654.695.000		1.704.336.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12	20	1.500.000.000	20	1.545.000.000	20	1.622.250.000	20	1.654.695.000	20	1.704.336.000	
4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.200.000.000		5.356.000.000		5.623.800.000		5.736.276.000		5.908.365.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	152	155	5.200.000.000	155	5.356.000.000	155	5.623.800.000	155	5.736.276.000	155	5.908.365.000	
4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				160.000.000		164.800.000		173.040.000		176.501.000		181.797.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	50	100	160.000.000	100	164.800.000	100	173.040.000	100	176.501.000	100	181.797.000	
4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.500.000.000		1.530.000.000		1.606.500.000		1.638.630.000		1.687.789.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	843	350	1.500.000.000	350	1.530.000.000	350	1.606.500.000	350	1.638.630.000	350	1.687.789.000	

4.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		15.000.000		15.750.000		16.065.000		16.547.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	0	0	1	15.000.000	1	15.750.000	1	16.065.000	1	16.547.000	
4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3.500.000.000		3.605.000.000		3.785.250.000		3.860.955.000		3.976.784.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	3	3.500.000.000	3	3.605.000.000	3	3.785.250.000	3	3.860.955.000	3	3.976.784.000	
4.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.000.000.000		1.030.000.000		1.081.500.000		1.103.130.000		1.136.224.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	9	3	1.000.000.000	3	1.030.000.000	3	1.081.500.000	3	1.103.130.000	3	1.136.224.000	
4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2.501.924.454		2.576.983.000		2.705.833.000		2.759.951.000		2.842.751.000	
Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	1	2	2.501.924.454	2	2.576.983.000	2	2.705.833.000	2	2.759.951.000	2	2.842.751.000	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		



	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	1	2		2		2		2		2		
4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				250.000.000		257.500.000		270.375.000		275.783.000		284.057.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	1	2	250.000.000	2	257.500.000	2	270.375.000	2	275.783.000	2	284.057.000	
4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				300.000.000		309.000.000		324.450.000		330.939.000		340.868.000	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1	1	300.000.000	1	309.000.000	1	324.450.000	1	330.939.000	1	340.868.000	
4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.951.924.454		2.010.483.000		2.111.008.000		2.153.229.000		2.217.826.000	
Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	1	2	1.951.924.454	2	2.010.483.000	2	2.111.008.000	2	2.153.229.000	2	2.217.826.000	
4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				1.900.000.000		1.957.000.000		2.054.850.000		2.095.948.000		2.158.827.000	

Terpenuhinya kebutuhan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4	3	1.900.000.000	3	1.957.000.000	3	2.054.850.000	3	2.095.948.000	3	2.158.827.000	
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4	3		3		3		3		3		
4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				840.000.000		865.200.000		908.460.000		926.630.000		954.429.000	
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4	3	840.000.000	3	865.200.000	3	908.460.000	3	926.630.000	3	954.429.000	
4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				560.000.000		576.800.000		605.640.000		617.753.000		636.286.000	
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4	3	560.000.000	3	576.800.000	3	605.640.000	3	617.753.000	3	636.286.000	
4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				500.000.000		515.000.000		540.750.000		551.565.000		568.112.000	
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	1	1	500.000.000	1	515.000.000	1	540.750.000	1	551.565.000	1	568.112.000	
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				45.036.925.121		46.388.037.000		48.707.443.000		49.681.597.000		51.201.979.246	

Meningkatnya Kualitas Kebijakan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Kegiatan Kerja Sama yang Ditindaklanjuti (%)	90	85	45.036.925.121	85	46.388.037.000	86	48.707.443.000	87	49.681.597.000	88	51.201.979.246	4.01.0.00.0.00.01.00 00 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Ditindaklanjuti (Poin)	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang Difasilitasi (%)	95	95		95		95		95		95		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.00 02 - Bagian Pemerintahan
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan				11.966.485.000		12.325.480.000		12.941.755.000		13.200.591.000		13.626.537.246	
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi terkait Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	4	3	11.966.485.000	3	12.325.480.000	3	12.941.755.000	3	13.200.591.000	3	13.626.537.246	
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	5	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	4	3		3		3		3		3		

4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan				9.503.500.000		9.788.605.000		10.278.036.00 0		10.483.597.00 0		10.798.105.00 0	
Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	5	2	9.503.500.000	2	9.788.605.000	2	10.278.036.00 0	2	10.483.597.00 0	2	10.798.105.00 0	
4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1.391.569.500		1.433.317.000		1.504.983.000		1.535.083.000		1.581.136.000	
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	4	3	1.391.569.500	3	1.433.317.000	3	1.504.983.000	3	1.535.083.000	3	1.581.136.000	
4.01.02.2.01.0003 - Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah				1.071.415.500		1.103.558.000		1.158.736.000		1.181.911.000		1.247.296.246	
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	4	3	1.071.415.500	3	1.103.558.000	3	1.158.736.000	3	1.181.911.000	3	1.247.296.246	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum yang Ditindaklanjuti (Poin)	100	100	45.036.925.121	100	46.388.037.000	100	48.707.443.000	100	49.681.597.000	100	51.201.979.246	4.01.0.00.0.00.01.00 03 - Bagian Hukum
4.01.02.2.03 - Fasilitas dan Koordinasi Hukum				2.763.947.320		2.846.867.000		2.989.212.000		3.048.998.000		3.140.470.000	
Terlaksananya Tindak Lanjut Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	548	444	2.763.947.320	469	2.846.867.000	494	2.989.212.000	519	3.048.998.000	544	3.140.470.000	
	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	548	444		469		494		519		544		
	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum (Kasus)	44	19		21		23		25		27		
4.01.02.2.03.0001 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah				568.300.000		585.349.000		614.617.000		626.910.000		645.718.000	

Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	548	444	568.300.000	469	585.349.000	494	614.617.000	519	626.910.000	544	645.718.000	
4.01.02.2.03.0002 - Fasilitas Bantuan Hukum				904.499.420		931.635.000		978.217.000		997.782.000		1.027.716.000	
Terlaksananya Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum (Kasus)	44	19	904.499.420	21	931.635.000	23	978.217.000	25	997.782.000	27	1.027.716.000	
4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				1.291.147.900		1.329.883.000		1.396.378.000		1.424.306.000		1.467.036.000	
Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	548	444	1.291.147.900	469	1.329.883.000	494	1.396.378.000	519	1.424.306.000	544	1.467.036.000	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang Difasilitasi (%)	95	95		95		95		95		95		4.01.0.00.0.00.01.00 07 - Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				19.700.867.37 <sub>9</sub>		20.291.894.00 <sub>0</sub>		21.306.490.00 <sub>0</sub>		21.732.621.00 <sub>0</sub>		22.384.601.00 <sub>0</sub>	
Terlaksananya Fasilitas dan Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	3	11	19.700.867.37 <sub>9</sub>	11	20.291.894.00 <sub>0</sub>	11	21.306.490.00 <sub>0</sub>	11	21.732.621.00 <sub>0</sub>	11	22.384.601.00 <sub>0</sub>	

	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	2	6		6		6		6		6		
	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	1	2		2		2		2		2		
4.01.02.2.02.0001 - Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual				14.582.464.874		15.019.939.000		15.770.936.000		16.086.355.000		16.568.946.000	
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	3	11	14.582.464.874	11	15.019.939.000	11	15.770.936.000	11	16.086.355.000	11	16.568.946.000	
4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				2.082.798.805		2.145.283.000		2.252.548.000		2.297.599.000		2.366.527.000	

Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	2	6	2.082.798.805	6	2.145.283.000	6	2.252.548.000	6	2.297.599.000	6	2.366.527.000	
4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat				3.035.603.700		3.126.672.000		3.283.006.000		3.348.667.000		3.449.128.000	
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	1	2	3.035.603.700	2	3.126.672.000	2	3.283.006.000	2	3.348.667.000	2	3.449.128.000	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Persentase Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Kegiatan Kerja Sama yang Ditindaklanjuti (%)	83	85	45.036.925.121	85	46.388.037.000	86	48.707.443.000	87	49.681.597.000	88	51.201.979.246	4.01.0.00.0.00.01.00 11 - Bagian Kerjasama dan Perkotaan
4.01.02.2.04 - Fasilitas Kerja Sama Daerah				10.605.625.422		10.923.796.000		11.469.986.000		11.699.387.000		12.050.371.000	

Terlaksananya Fasilitas dan Evaluasi Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	-	10	10.605.625.422	10	10.923.796.000	10	11.469.986.000	10	11.699.387.000	10	12.050.371.000	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	1	10		10		10		10		10		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	2	20		20		20		20		20		
4.01.02.2.04.0001 - Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri				10.155.415.585		10.460.079.000		10.983.083.000		11.202.745.000		11.538.828.000	
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	2	20	10.155.415.585	20	10.460.079.000	20	10.983.083.000	20	11.202.745.000	20	11.538.828.000	
4.01.02.2.04.0002 - Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri				300.209.837		309.217.000		324.678.000		331.172.000		341.108.000	
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	1	10	300.209.837	10	309.217.000	10	324.678.000	10	331.172.000	10	341.108.000	
4.01.02.2.04.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				150.000.000		154.500.000		162.225.000		165.470.000		170.435.000	
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	-	10	150.000.000	10	154.500.000	10	162.225.000	10	165.470.000	10	170.435.000	
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				4.888.859.443		5.035.528.000		5.287.307.000		5.393.057.000		5.554.852.000	
Meningkatnya Kualitas kebijakan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan				0		0		0		0		0	4.01.0.00.0.00.01.00 00 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Fasilitas Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Fasilitas Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		



	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (Poin)	85,49	85,5		85,6		85,7		85,8		85,9		
	Persentase Fasilitasi Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.00 05 - Bagian Perekonomian
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				1.012.510.715		1.042.887.000		1.095.033.000		1.116.935.000		1.150.444.000	
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4	4	1.012.510.715	4	1.042.887.000	4	1.095.033.000	4	1.116.935.000	4	1.150.444.000	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	8	8		8		8		8		8		
	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	4	2		2		2		2		2		
4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				377.000.000		388.310.000		407.726.000		415.881.000		428.358.000	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	8	8	377.000.000	8	388.310.000	8	407.726.000	8	415.881.000	8	428.358.000	
4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				447.000.000		460.410.000		483.431.000		493.100.000		507.893.000	

Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4	4	447.000.000	4	460.410.000	4	483.431.000	4	493.100.000	4	507.893.000	
4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				188.510.715		194.167.000		203.876.000		207.954.000		214.193.000	
Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	4	2	188.510.715	2	194.167.000	2	203.876.000	2	207.954.000	2	214.193.000	
Meningkatnya Kualitas kebijakan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Fasilitasi Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	4.888.859.443	100	5.035.528.000	100	5.287.307.000	100	5.393.057.000	100	5.554.852.000	4.01.0.00.0.00.01.00 06 - Bagian Administrasi Pembangunan
4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				1.358.512.382		1.399.269.000		1.469.233.000		1.498.619.000		1.543.578.000	
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi terkait Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	12	12	1.358.512.382	12	1.399.269.000	12	1.469.233.000	12	1.498.619.000	12	1.543.578.000	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	1	4		4		4		4		4		
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	4	4		4		4		4		4		
4.01.03.2.02.0001 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan				492.806.654		238.087.319		261.896.051		278.085.656		300.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	1	4	492.806.654	4	238.087.319	4	261.896.051	4	278.085.656	4	300.000.000	
4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				329.513.018		339.399.000		356.369.000		363.497.000		374.402.000	

Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	4	4	329.513.018	4	339.399.000	4	356.369.000	4	363.497.000	4	374.402.000	
4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				536.192.710		821.782.681		850.967.949		857.036.344		869.176.000	
Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	12	12	536.192.710	12	821.782.681	12	850.967.949	12	857.036.344	12	869.176.000	
Meningkatnya Kualitas kebijakan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (Poin)	85,49	85,5	4.888.859.443	85,6	5.035.528.000	85,7	5.287.307.000	85,8	5.393.057.000	85,9	5.554.852.000	4.01.0.00.0.00.01.00 08 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				2.517.836.346		2.593.372.000		2.723.041.000		2.777.503.000		2.860.830.000	
Meningkatnya kualitas layanan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	854	860	2.517.836.346	865	2.593.372.000	870	2.723.041.000	875	2.777.503.000	880	2.860.830.000	
	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	180	300		320		340		360		380		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	2.363	2.000		2.010		2.020		2.030		2.040		
4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				700.000.000		721.000.000		757.050.000		772.191.000		795.357.000	
Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	2.363	2.000	700.000.000	2.010	721.000.000	2.020	757.050.000	2.030	772.191.000	2.040	795.357.000	
4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				746.543.191		768.940.000		807.387.000		823.535.000		848.242.000	

Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	180	300	746.543.191	320	768.940.000	340	807.387.000	360	823.535.000	380	848.242.000	
4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				1.071.293.155		1.103.432.000		1.158.604.000		1.181.777.000		1.217.231.000	
Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	854	860	1.071.293.155	865	1.103.432.000	870	1.158.604.000	875	1.181.777.000	880	1.217.231.000	

#### **4.2 Sub Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Kepala Daerah**

Program prioritas kepala daerah adalah program-program utama yang ditetapkan oleh kepala daerah untuk dilaksanakan dalam masa jabatannya, bertujuan untuk mengatasi isu strategis dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Program prioritas merupakan bentuk konkret dari janji politik dan arah kebijakan pembangunan selama masa jabatan kepala daerah tersebut. Program-program ini biasanya berdampak langsung pada pembangunan daerah dan kesejahteraan Masyarakat Adapun 9 Program Prioritas Kepala Daerah Periode 2025-2030 yaitu :

1. Transformasi Birokrasi
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
3. Mengatasi Stunting
4. Penyediaan Air Bersih yang Sehat dan Merata
5. Pengendalian Banjir
6. Lingkungan Hidup dan Sosial yang Sehat dan Nyaman
7. Balikpapan Kota MICE dan Wisata
8. Balikpapan Kota Inovatif dan Kreatif
9. Balikpapan Kota Ramah Anak

**Tabel 4.3**  
**Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas**  
**Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>4.01.0.00.0.00.01.0001 - Bagian Keuangan</b>				
1.	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
4.01.0.00.0.00.01.0002 - Bagian Pemerintahan				
2.	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Kualitas Kebijakan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
			4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan	
			4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
			4.01.02.2.01.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
4.01.0.00.0.00.01.0003 - Bagian Hukum				
3.	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Kualitas Kebijakan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
			4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
			4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum	
			4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan  Pengelolaan Informasi Hukum	
4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Organisasi				
4.	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
			4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
			4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
			4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
			4.01.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			4.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
4.01.0.00.0.00.01.0005 - Bagian Perekonomian				
5.	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya Kualitas kebijakan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
			4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
			4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
			4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	
4.01.0.00.0.00.01.0006 - Bagian Administrasi Pembangunan				
6.	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya Kualitas kebijakan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
			4.01.03.2.02.0001 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
			4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
			4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
4.01.0.00.0.00.01.0007 - Bagian Kesejahteraan Rakyat				
7.	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Kualitas Kebijakan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
			4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	
			4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
4.01.0.00.0.00.01.0008 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa				
8.	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya Kualitas kebijakan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
			4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
4.01.0.00.0.00.01.0009 - Bagian Umum dan Perengkapan				
9.	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
			4.01.01.2.14.0001 - Fasilitasi Keprotokolan	
			4.01.01.2.14.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
			4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan	
4.01.0.00.0.00.01.0010 - Bagian Umum dan Perengkapan				
10.	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			4.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
		kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi  Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			4.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			4.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			4.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			4.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			4.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			4.01.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	
			4.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			4.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
			4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			4.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
			4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			4.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
			4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
			4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
			4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
4.01.0.00.0.00.01.0011 - Bagian Kerjasama dan Perkotaan				
11.	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Kualitas Kebijakan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	4.01.02.2.04 - Fasilitas Kerja Sama Daerah	
			4.01.02.2.04.0001 - Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	
			4.01.02.2.04.0002 - Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	
			4.01.02.2.04.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDD) Kota Balikpapan. Hal ini dimaksudkan agar indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kota Balikpapan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Sekretariat Daerah yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Balikpapan, Sekretariat Daerah berkontribusi untuk mewujudkan Tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD dengan target sebagai berikut:

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH									
2.	Nilai Reformasi Birokrasi General	Poin	69,96	69,98	70,18	70,28	70,38	70,48	70,58	
3.	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	Poin	8,32	8,32	8,34	8,36	8,38	8,4	8,42	
4.	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Poin	3,25	3,7018	3,703	3,704	3,705	3,706	3,707	
5.	Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Nilai AKIP Komponen Pelaporan	Poin	9,48	9,72	9,82	9,89	9,96	10,03	10,1	
7.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Poin	73,7	74	74,1	74,2	74,3	74,4	74,5	
8.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,33	77,03	77,5	77,8	78	78,3	78,8	
9.	Persentase Kerja Sama Daerah yang Ditindaklanjuti	%	90	90,2	90,4	90,6	90,8	91	91,2	
10.	Persentase Rata-Rata Capaian Realisasi Fisik Kota Balikpapan	%	96,49	96,5	96,6	96,65	96,7	96,75	96,8	
11.	Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Ditetapkan	%	90	90,2	90,4	90,6	90,8	91	91,2	
12.	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	98,32	98,35	98,4	98,45	98,5	98,55	98,6	

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH									
2.	Nilai Reformasi Birokrasi General	positif	Poin	69,96	69,98	70,18	70,28	70,38	70,48	70,58
3.	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	positif	Poin	8,32	8,32	8,34	8,36	8,38	8,4	8,42
4.	Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti	positif	%	100	100	100	100	100	100	100
5.	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	positif	Poin	3,25	3,7018	3,703	3,704	3,705	3,706	3,707
6.	Nilai AKIP Komponen Pelaporan	positif	Poin	9,48	9,72	9,82	9,89	9,96	10,03	10,1
7.	Persentase Kerja Sama Daerah yang Ditindaklanjuti	positif	%	90	90,2	90,4	90,6	90,8	91	91,2
8.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	positif	Nilai	76,33	77,03	77,5	77,8	78	78,3	78,8
9.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	positif	Poin	73,7	74	74,1	74,2	74,3	74,4	74,5
10.	Persentase Rata- Rata Capaian Realisasi Fisik Kota Balikpapan	positif	%	96,49	96,5	96,6	96,65	96,7	96,75	96,8
11.	Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Ditetapkan	positif	%	90	90,2	90,4	90,6	90,8	91	91,2
12.	Indeks Reformasi Hukum	positif	Indeks	98,32	98,35	98,4	98,45	98,5	98,55	98,6
13.	Persentase Fasilitasi Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti	positif	%	100	100	100	100	100	100	100
14.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	positif	Nilai	76,54	76,8	77	77,3	77,5	77,8	78
15.	Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan yang difasilitasi	positif	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
16.	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Positif	Poin	78,33	78,4	78,5	79	79,5	79,8	80
17.	Persentase Fasilitasi Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang Ditindaklanjuti	positif	%	100	100	100	100	100	100	100
18.	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang Difasilitasi	positif	%	95	95	95	95	95	95	95
19.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	positif	Poin	85,49	85,49	85,5	85,6	85,7	85,8	85,9
20.	Nilai AKIP Perangkat Daerah Komponen Perencanaan	positif		23,63	24,09	24,2	24,5	24,7	25	25,5
21.	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Ditindaklanjuti	positif	Poin	100	100	100	100	100	100	100
22.	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Kegiatan Kerja Sama yang Ditindaklanjuti	positif	%	90	83	85	85	86	87	88
23.	Indeks Kematangan Organisasi	positif	Poin	40	40	41	42	43	44	45
24.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	positif	%	7,67	7,68	7,69	7,7	7,71	7,72	7,73
25.	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	positif	unit	6	6	6	6	6	6	6



NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
26.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	positif	%	53,23	53,24	53,25	53,26	53,27	53,28	53,29
27.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	positif	%	96,66	96,67	96,68	96,69	96,7	96,71	96,72
28.	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	positif	%	100	100	100	100	100	100	100

## BAB V

### PENUTUP

Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam menyelenggarakan pembangunan daerah Kota Balikpapan selama lima tahun kedepan yang disusun sinergis dengan dokumen RPJPD 2025-2045 dan penjabaran dari dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam mencapai target-target sasaran yang telah disepakati bersama. Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya.

Pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 akan tercapai apabila dijalankan dengan tanggungjawab moral, dedikasi yang tinggi, koordinasi, kerjasama dan keterpaduan/sinergisitas serta komitmen yang kuat dari segenap jajaran aparatur Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggungjawabnya guna mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif dalam melayani rakyat melalui reformasi birokrasi.

## V. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu instrument pembangunan yang sangat penting. Formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dituangkan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Keberadaan perencanaan di dalam sebuah organisasi secara umum dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan organisasi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

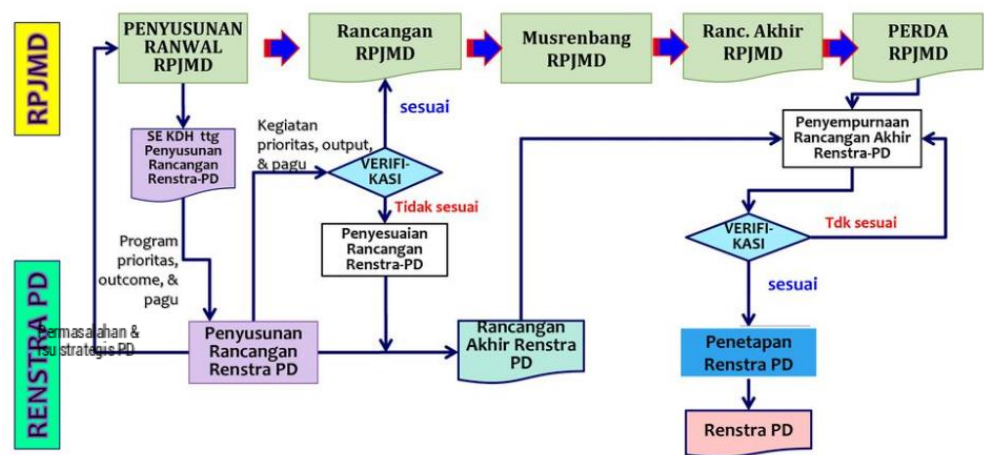
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 11 ayat 3 rencana perangkat daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah. Dokumen perencanaan tersebut adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan dari Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pembangunan Daerah merupakan sub sistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis Perangkat Daerah merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah harus mengacu sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan

tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dalam mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan. Keterkaitan tahapan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut.

Gambar 1. 1  
Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar 1. 2  
Konsep Penyusunan RENSTRA Sekretariat DPRD



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

Berkaitan dengan hirarki organisasi, Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2030 serta memperhatikan Peraturan WaliKota Balikpapan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan. Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan sebagai lembaga yang modern, terbuka, aspiratif, dan berintegritas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan harus menjadi *supporting system* yang profesional dan modern agar selalu melakukan peningkatan kualitas pelayanan kedewanan. Memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga, Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan 2025-2030 disusun sebagai kelanjutan dari Renstra periode 2021-2026.

Selanjutnya rancangan akhir Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan disahkan dengan keputusan Walikota sehingga menjadi Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan. Berdasarkan keputusan Walikota tentang pengesahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan tersebut, Sekretaris DPRD Kota

Balikpapan menetapkan Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yang lebih lanjut akan menjadi pedoman unit kerja dilingkungan Sekretariat DPRD dalam menyusun Rancangan Kerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.

Dalam kaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Renstra Sekretariat DPRD ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan disusun untuk mewujudkan komitmen dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat DPRD. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan Renstra yang tersusun akan selalu terarah dan semakin mempertegas tujuan yang harus diwujudkan oleh setiap aparatur pemerintah yang bertugas di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud  
Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2025- 2029 dimaksudkan untuk:  
  
Sebagai salah satu Dokumen Perencanaan yang menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun kedepan;
2. Tujuan  
Tujuan Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029 adalah:
  - a. Sebagai acuan dalam mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan;

- b. Mengoptimalkan Fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD Kota Balikpapan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2025- 2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sub bab ini merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Sub bab ini mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Sub bab ini menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sub bab ini menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD tahun 2025-2029.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Sub bab ini menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan IKK.

#### **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Sub bab ini mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD. Serta identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **1.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

Pada sub bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Yang disajikan dalam tabel yang berisi tujuan, sasaran, indikator tujuan/sasaran dan target kinerja selama 5 (lima) tahun.

#### **1.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Sub bab ini memuat informasi yang berisi strategi rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan. Serta menyajikan informasi mengenai rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

#### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

##### **4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pendanaan**

Pada sub bab ini memuat informasi mengenai daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

##### **4.2. Subkegiatan yang mendukung Program Prioritas Kepala Daerah**

Pada sub bab ini menjelaskan subkegiatan yang mendukung urusan program prioritas kepala daerah.

##### **4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Pada sub bab ini menjelaskan penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bappeda Litbang Kota Balikpapan.



**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT**  
**DPRD KOTA BALIKPAPAN**

**2.1. Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan**

**2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat DPRD Kota Balikpapan**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa tugas Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- c. Fasilitasi penyelenggaraan Rapat DPRD.
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, susunan organisasi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan terdiri atas:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum, yang membawahkan Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- c. Bagian Program dan Keuangan;
- d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
- e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Adapun Tugas dan Fungsi masing-masing bagian pada Sekretariat DPRD Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

**a. Sekretaris DPRD**

Sekretaris DPRD mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang sekretariat dewan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Sekretaris DPRD, melaksanakan fungsi:

- 1) penyelenggaraan kegiatan pelayanan administratif kesekretariatan dan keuangan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta mempersiapkan kegiatan persidangan, rapat dan risalah serta peninjauan DPRD;
- 2) penyelenggaraan kegiatan pengadministrasian umum Setwan, merumuskan dan mengkaji, peraturan perundang-undangan pemerintahan dan Pemerintah Daerah serta kehumasan;
- 3) pengkoordinasian dan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai kemampuan keuangan Daerah serta memfasilitasi delegasi masyarakat dan tamu DPRD; dan
- 4) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Sekretaris DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b. Bagian Umum**

Bagian Umum sebagaimana dimaksud mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bagian Umum melaksanakan fungsi:

- 1) menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- 2) mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- 3) mengelola layanan administrasi DPRD;
- 4) mengelola layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD;
- 5) menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga rumah jabatan DPRD;
- 6) menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung Sekretariat DPRD dan gedung DPRD;
- 7) menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab Sekretariat DPRD dan DPRD; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan Sekretaris DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugasnya, bagian umum membawahi subbagian tata usaha dan kepegawaian yang mempunyai urusan tugas:

- 1) melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas di lingkungan Sekretariat DPRD;
- 2) melaksanakan kearsipan;
- 3) menyusun administrasi kepegawaian;
- 4) menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- 5) menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
- 6) menyiapkan bahan administrasi keuangan dan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
- 7) menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai; dan

- 8) pelaksanaan uraian tugas lainnya yang diberikan Bagian Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**c. Bagian Program dan Keuangan**

Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi perencanaan dan keuangan DPRD. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bagian Program dan Keuangan melaksanakan fungsi:

- 1) menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- 2) mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- 3) memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD; (catatan: hanya verifikasi usulan dari bagian umum)
- 4) memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD; (catatan: hanya verifikasi usulan dari bagian umum)
- 5) menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- 6) melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- 7) mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- 8) memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- 9) mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- 10) mengoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- 11) mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- 12) menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
- 13) melaksanakan survey kepuasan internal Sekretariat DPRD; dan
- 14) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan Sekretaris DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan**

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi dan keprotokolan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bagian Persidangan dan Perundang-undangan melaksanakan fungsi:

- 1) menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- 2) memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- 3) memfasilitasi penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD;
- 4) memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 5) mengumpulkan bahan penyiapan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD;
- 6) memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;

- 7) menyusun risalah rapat;
- 8) mengoordinasikan pembahasan rancangan peraturan daerah;
- 9) memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
- 10) menyelenggarakan hubungan masyarakat;
- 11) menyelenggarakan publikasi DPRD;
- 12) menyelenggarakan keprotokolan DPRD;
- 13) melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas DPRD;
- 14) melaksanakan fasilitasi tugas dan fungsi pimpinan DPRD;
- 15) melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan semester dan kinerja DPRD;
- 16) melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana kerja dan agenda kerja DPRD dalam Badan Musyawarah (Banmus);
- 17) memfasilitasi pelaksanaan agenda kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda);
- 18) melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan panitia khusus (pansus);
- 19) memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- 20) mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD; dan
- 21) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugasnya.

**e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan**

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bagian Persidangan dan Perundang-undangan melaksanakan fungsi:

- 1) memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/ KUPA PPAS perubahan;
- 2) memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan APBD/APBD perubahan;
- 3) memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 4) memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- 5) memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- 6) memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 7) memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan penyerapan dan penghimpunan aspirasi Masyarakat;
- 8) memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi rancangan peraturan daerah;

- 9) memfasilitasi, mengoordinasikan, mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- 10) memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- 11) memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- 12) memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan dukungan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- 13) memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- 14) memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah;
- 15) memfasilitasi pelaksanaan agenda kerja Badan Anggaran dan Badan Kehormatan; dan
- 16) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugasnya.

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Tipologi A yang berpedoman pada Permendagri 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota digambarkan pada bagian berikut ini.

**Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan**



Sumber: Permendagri 104 Tahun 2016

**2.1.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD Kota Balikpapan**

Sumber daya pada Perangkat Daerah merupakan elemen-elemen yang saling terkait dan penting untuk mendukung kinerja dan keberhasilan birokrasi. Peningkatan kualitas SDM, efisiensi pengelolaan anggaran, penggunaan teknologi secara efektif, dan pengelolaan sumber daya material yang baik merupakan kunci untuk mencapai birokrasi yang efisien, efektif, dan berintegritas.

2.1.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut. Berdasarkan data kepegawaian tahun 2025, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD Kota Balikpapan memiliki data personil ASN dan Pegawai Non ASN sebanyak orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 2. 1  
Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

NO	PEGAWAI	JUMLAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<b>Berdasarkan Status Pegawai</b> 1) PNS 2) PPPK 3) Tenaga Bantu	24 33 7	
2	<b>Berdasarkan Jenis Kelamin</b> 1) PNS - Pria - Wanita 2) PPPK - Pria - Wanita 3) Tenaga Bantu - Pria - Wanita	14 10 17 16 2 5	
3	<b>Berdasarkan Status Pendidikan</b> 1) S2 2) S1 3) DIPLOMA 4) SLTA/SEDERAJAT 5) SMP/SEDERAJAT 6) SD	5 26 3 27 3 0	
4	<b>Berdasarkan Golongan</b> 1) PNS - Golongan I - Golongan II - Golongan III - Golongan IV 2) PPPK - Golongan IX - Golongan VII - Golongan V	0 6 15 3 11 1 21	
5	<b>Berdasarkan Jabatan Struktural</b> 1) Eselon II 2) Eselon III 3) Eselon IV	1 3 1	

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

2.1.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dilengkapi dengan sarana dan

prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan dinas, tabung portable, inventaris barang, dan lain-lain. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian lagi dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Daftar jenis, jumlah, dan kondisi sarana dan prasarana Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sebelum reviu dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2. 2**  
**Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kota Balikpapan**

NO	JENIS SARANA / PRASARANA	SATUAN	KONDISI			JUMLAH
			BAIK	SEDANG	RUSAK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mobil Stacion Wagon / Kijang Inova	Unit	1	0	0	1
2	Rak Penyimpanan	Unit	1	0	0	1
3	Lemari Penyimpanan	Unit	3	6	0	9
4	Lemari Besi/metal	Unit	2	0	0	2
5	Lemari Kayu	Unit	2	0	0	2
6	LCD Projector/Infocus	Unit	4	0	0	4
7	Papan Tulis	Unit	1	0	0	1
8	Meja Kerja Kayu	Unit	9	0	0	9
9	Meja Rapat	Unit	3	0	0	3
10	Meja Resepcionis	Unit	1	0	0	1
11	Meja Tambahan	Unit	1	0	0	1
12	Meja Bundar	Unit	6	0	0	6
13	Meja Setengah Biro	Unit	1	0	0	1
14	Kasur /Spring Bed	Unit	6	0	0	6
15	Meja Makan Besi	Unit	1	0	0	1
16	Meja makan Kayu	Unit	5	0	0	5
17	Kursi rapat	Unit	1	0	0	1
18	Kursi tamu	Unit	1	0	0	1
19	Kursi Biasa	Unit	2	0	0	2
20	Rak Sepatu	Unit	1	0	0	1
21	Sofa	Unit	15	0	0	15
22	Jam Mekanis	Unit	9	0	0	9
23	Mesin Penghisap Debu / Vacum Cleaner	Unit	4	0	0	4
24	Lemari Es	Unit	7	0	0	7
25	A.C. Split	Unit	29	0	2	31
26	Kitchen Set	Unit	1	0	0	1
27	Amplifier	Unit	1	0	0	1
28	Sound System	Unit	6	0	0	6
29	Tangga Aluminium	Unit	1	0	0	1
30	Karpet	Unit	1	0	0	1
31	Gordyin/Kray	Unit	1	0	0	1
32	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Unit	3	0	0	3
33	Meja Tamu Biasa	Unit	10	0	0	10
34	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	14	0	0	14
35	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Unit	22	0	0	22
36	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Lainnya	Unit	1	0	0	1
37	Rak Peralatan	Unit	1	0	0	1
38	TV Monitor	Unit	8	0	1	9
39	Bendera Merah Putih	Buah	2	0	0	2

NO	JENIS SARANA / PRASARANA	SATUAN	KONDISI			JUMLAH
			BAIK	SEDANG	RUSAK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
40	Kamera Digital	Unit	3	0	0	3
41	P.C Unit	Unit	22	0	0	22
42	Lap Top	Unit	19	0	1	20
43	Tablet PC	Unit	42	0	4	46
44	Keyboard (Peralatan Mini Komputer	Unit	38	0	8	46
45	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	32	0	0	32
46	Mesin Absensi	Unit	2	0	0	2
47	Mitsubishi Pajero Sport Dakar	Unit	4	0	0	4
48	Vidio Monitor	Unit	6	0	0	6
49	Kursi Lipat	Unit	149	0	0	149
50	Treadmill	Unit	1	0	0	1
51	Dispenser	Unit	6	0	0	6
52	Coffee Maker	Unit	11	0	0	11
53	Voice Recorder	Unit	6	0	0	6
54	Handy Talky (HT)	Unit	18	0	0	18
55	Personal Komputer	Unit	4	0	0	4
56	Scanner	Unit	9	0	0	9
57	Meubeleur	Unit	3	0	0	3

Sumber: Data diolah peneliti (2025)



### 2.1.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan berdasarkan target Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan periode sebelumnya (2021–2026). Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dengan target kinerja. Pencapaian realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan setiap tahunnya mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2025 seberapa besar tercapai bahkan melebihi dari target. Secara terperinci evaluasi pelaksanaan kinerja dan realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kota Balikpapan berdasarkan Renstra ditunjukkan pada Tabel 2.3 dibawah ini.

**Tabel 2. 3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN	TARGET RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- (%)					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE- (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)					(4)					(5)				
INDIKATOR SASARAN																
1	Cakupan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	100%	100%	N/A	N/A	N/A	91,25%	93,61%	N/A	N/A	N/A	91,25%	93,61%	N/A	N/A	N/A
2	Cakupan Layanan Pengaduan Masyarakat	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	87,60%	N/A	N/A	N/A	100%	87,60%	N/A	N/A	N/A
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	B	B	N/A	N/A	N/A	CC	B	B	BB	BB	100%	100%	N/A	N/A	N/A
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	N/A	27	28	29	N/A	N/A	27,01	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN	TARGET RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- (%)					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE- (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)					(4)					(5)				
5	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	N/A	N/A	70	72	74	N/A	N/A	65,85	72,79	74,51	N/A	N/A	94%	101%	101%
6	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	N/A	N/A	N/A	64,86	72,82	63,09	64,59	64,86	72,82	74,77	N/A	N/A	N/A	112%	103%
<b>INDIKATOR PROGRAM</b>																
1	IKM Internal Perangkat Daerah	N/A	N/A	70	72	74	N/A	N/A	65,85	85,47	86,97	N/A	N/A	94%	119%	118%
2	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terasilitasi	N/A	N/A	70	72	74	N/A	N/A	72,1	83	100	N/A	N/A	103%	115%	135%

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

#### **2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan**

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, penentuan kelompok sasaran merupakan elemen penting yang digunakan untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan layanan yang dilaksanakan tepat guna dan tepat sasaran. Penetapan kelompok sasaran ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sebagai unsur pendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD Kota Balikpapan. Sekretariat DPRD Kota Balikpapan memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Kelompok sasaran yang dimaksud meliputi penerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari dukungan administrasi dan operasional yang disediakan oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.

##### **2.1.4.1. Pimpinan dan Anggota DPRD**

Sebagai pemangku kepentingan utama, pimpinan dan anggota DPRD menjadi kelompok sasaran prioritas dalam pelaksanaan program Sekretariat DPRD Kota Balikpapan. Dukungan diarahkan pada penyediaan layanan administrasi, fasilitasi kegiatan kedewanan, serta pemenuhan kebutuhan informasi, data, dan sarana prasarana untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan efektivitas kerja legislatif.

##### **2.1.4.2. Alat Kelengkapan DPRD**

Alat kelengkapan DPRD seperti komisi, badan anggaran, dan badan kehormatan memerlukan dukungan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini Sekretariat DPRD Kota Balikpapan berperan dalam menyediakan fasilitasi pelaksanaan rapat kerja, dokumentasi hasil pembahasan, penyediaan bahan pendukung, pengelolaan agenda kegiatan, dan hal-hal lain yang mendukung kinerja alat kelengkapan DPRD Kota Balikpapan.

##### **2.1.4.3. Masyarakat**

Sebagai bagian dari lembaga perwakilan rakyat, DPRD memiliki tanggung jawab untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sekretariat DPRD turut berperan dalam memfasilitasi proses penyerapan aspirasi, termasuk dalam kegiatan audiensi, reses, konsultasi publik, dan pengelolaan pengaduan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat menjadi kelompok sasaran tidak langsung dari pelayanan Sekretariat DPRD.

##### **2.1.4.4. Pemerintah Daerah (Eksekutif)**

Sebagai mitra kerja DPRD dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, pemerintah daerah menjadi kelompok sasaran strategis. Sehingga, hubungan kerja antara DPRD

dan pemerintah daerah memerlukan koordinasi yang intensif. Sekretariat DPRD menjembatani berbagai proses administratif dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Pemerintah daerah menjadi mitra sekaligus kelompok sasaran yang dilibatkan dalam penyusunan agenda bersama, pembahasan RAPBD, pembahasan peraturan daerah, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan daerah.

#### **2.1.4.5. Media Massa dan Pemangku Kepentingan Lain**

Dalam rangka mendorong transparansi dan partisipasi publik, media massa serta pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian dari kelompok sasaran Sekretariat DPRD. Penyediaan informasi resmi, publikasi kegiatan, dan akses terhadap dokumen publik merupakan bagian dari strategi komunikasi Sekretariat untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga DPRD.

#### **2.1.5. Mitra Kerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, Sekretariat DPRD menjalin hubungan kerja dan koordinasi dengan berbagai pihak. Mitra kerja ini berperan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi DPRD, baik fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Peran mitra kerja Sekretariat DPRD yaitu:

1. Mempercepat arus informasi dan koordinasi lintas sektor;
2. Memastikan sinkronisasi agenda DPRD dengan eksekutif;
3. Mendorong partisipasi publik dalam proses legislasi;
4. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan DPRD;
5. Mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja DPRD.

Mitra kerja Sekretariat DPRD dapat berasal dari berbagai unsur yang terdiri dari Internal Pemerintah Daerah dan Eksternal Perangkat Daerah yaitu:

1. Mitra Kerja Internal Pemerintah Daerah
  - Pimpinan dan Anggota DPRD – sebagai penerima layanan utama Sekretariat DPRD.
  - Perangkat Daerah – khususnya Bappeda, BPKAD, Inspektorat, Bagian Hukum, Bagian Protokol, dan OPD teknis lainnya dalam rangka fasilitasi pembahasan kebijakan, program, dan anggaran.
  - Sekretariat Daerah – dalam penyelarasan agenda kerja dan administrasi pemerintahan.
2. Mitra Kerja Eksternal Pemerintah
  - Pemerintah Pusat – Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga teknis terkait untuk koordinasi kebijakan dan sinkronisasi program.

- Pemerintah Provinsi – khususnya Biro Pemerintahan dan Biro Hukum untuk fasilitasi pembinaan, evaluasi, dan supervisi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Pemerintah Daerah Lain – sebagai mitra pertukaran informasi, studi banding, dan kerja sama antar daerah.

### 3. Mitra Kerja Non-Pemerintah

- Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) – dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat dan partisipasi publik.
- Media Massa – sebagai mitra publikasi kegiatan DPRD dan penyebarluasan informasi publik.
- Akademisi dan Tenaga Ahli – untuk memberikan masukan berbasis kajian ilmiah dan naskah akademik.
- Dunia Usaha – sebagai mitra dalam pembahasan regulasi yang berkaitan dengan investasi dan perekonomian daerah.
- Tokoh Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lokal – sebagai sumber aspirasi dan mitra dialog kebijakan.

## 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

### 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya, secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Ketentuan tersebut merupakan tantangan bagi Sekretaris DPRD karena dalam melaksanakan tugasnya harus mampu mensinergikan pelaksanaan tugas dan proses kebijakan Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah bermitra, sejajar dan harmonis.

Sesuai dengan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada DPRD, Sekretariat DPRD dituntut semakin cepat, tepat dan mampu meletakkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Inilah yang menjadi permasalahan utama Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yakni **Belum Optimalnya Pelayanan Sekretariat DPRD Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**. Permasalahan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yang teridentifikasi antara lain dapat digambarkan sebagai berikut:

- Beban pekerjaan yang tidak merata antar Bagian pada Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Balikpapan. Akar permasalahan utama hal ini disebabkan karena struktur organisasi Sekretariat DPRD belum sesuai dengan Permendagri no. 104 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta PP Nomor 72 tahun

2019 tentang Perubahan atas PP no. 18 Tahun 2016. Dalam hal ini seharusnya SOTK Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sudah menjadi tipologi tipe-A untuk mewadahi beban kerja yang besar sehingga terbagi menjadi 4 (empat) bagian. Sehingga beban pekerjaan dapat terbagi rata antar bagian yang akan menunjang kinerja Perangkat Daerah menjadi lebih baik.

- Keterbatasan sumber daya aparatur pendukung Sekretariat DPRD baik dari segi kuantitas dan kualitas. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan terkait moratorium pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kebijakan yang berasal dari tingkat pusat ini, secara langsung menghambat penambahan jumlah pegawai berstatus ASN, yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendukung kesekretariatan.
- Belum memadainya sarana prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Sarana dan prasarana yang berperan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD belum tersedia secara memadai, baik dari segi jumlah, jenis, maupun kondisi, sehingga belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan operasional lembaga dalam menjalankan peran fasilitasi DPRD dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selain itu, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya sarana prasarana berbasis digital, belum terbangunnya sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung proses kerja kedewanan, serta rendahnya tingkat literasi digital di lingkungan Sekretariat DPRD yang berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan aplikasi dan data elektronik.
- Kinerja pelayanan yang belum optimal. Hal ini dipengaruhi akibat kurangnya standar atau pedoman tata laksana layanan terhadap fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD. Hal tersebut terjadi karena belum adanya kebijakan kelembagaan yang secara komprehensif mengatur alur, standar mutu, dan indikator kinerja layanan kedewanan, serta masih rendahnya kesadaran organisasi terhadap pentingnya standarisasi prosedur sebagai dasar peningkatan kualitas layanan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas. Selain itu kualitas perencanaan pada Sekretariat DPRD juga dinilai belum maksimal karena dipengaruhi dengan berbagai dinamika politik dalam memfasilitasi DPRD seperti minimnya komitmen terhadap jadwal dan rencana kerja DPRD yang sudah ditetapkan dan semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan oleh anggota DPRD juga mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan.

Tabel berikut merangkum pemetaan permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD yang menjadi dasar perencanaan strategis ini.

**Tabel 2. 4**  
**Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD**

<b>MASALAH POKOK</b>	<b>MASALAH</b>	<b>PENYEBAB MASALAH/ AKAR MASALAH</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
Belum optimalnya pelayanan Sekretariat DPRD	Beban pekerjaan yang tidak merata antar bagian	Struktur organisasi yang belum sesuai dengan Permendagri no. 104 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta PP Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas PP no. 18 Tahun 2016
	Keterbatasan sumber daya aparatur	Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pendukung Sekretariat DPRD karena keterbatasan formasi penerimaan ASN
	Belum memadainya sarana dan prasarana	Belum optimalnya ketersediaannya sarana dan prasarana dalam memfasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD
		Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam mendukung fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD
	Kinerja pelayanan belum optimal	Belum tersedianya standar atau pedoman tata laksana layanan terhadap fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD
		Kualitas perencanaan belum maksimal
		Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
		Minimnya komitmen terhadap jadwal dan rencana kerja DPRD yang sudah ditetapkan
		Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan oleh anggota DPRD

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

### **2.2.2. Isu Strategis**

Isu strategis adalah informasi, kejadian, fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh untuk dicarikan pemecahannya.

Berdasarkan pemetaan masalah dan akar masalah, beberapa isu strategis utama telah diidentifikasi yang memerlukan perhatian khusus dalam rencana strategis ini. Isu-isu ini tidak hanya mencerminkan tantangan internal Perangkat Daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika lingkungan eksternal. Isu-isu strategis yang diuraikan dalam renstra ini merupakan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang pada dasarnya terdiri dari potensi, peluang dan tantangan sebagai suatu kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang akan disusun karena dampaknya yang signifikan bagi Sekretariat DPRD di masa yang akan datang. Maka dapat diidentifikasi yang mempengaruhi isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sebagai berikut.

**Tabel 2. 5**  
**Isu Strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Seluruh Anggota DPRD Kota Balikpapan sudah memahami tugas dan fungsi sebagai DPRD	Struktur organisasi yang belum sesuai dengan Permendagri no. 104 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta PP Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas PP no. 18 Tahun 2016	Tata Kelola di Indonesia Masih Relatif Lemah	Reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, penyelundupan	Reformasi Birokrasi Berkelanjutan	Keterpaduan dan Sinkronisasi Agenda Kerja DPRD dengan Eksekutif yang Belum Optimal	Penguatan pelayanan Sekretariat DPRD untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD Kota Balikpapan
Dinamika politik yang cenderung stabil di Kota Balikpapan	Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pendukung Sekretariat DPRD karena keterbatasan formasi penerimaan ASN					
	Belum optimalnya ketersediaanya sarana dan prasarana dalam memfasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD					
	Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam mendukung fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD					
	Belum tersedianya standar atau pedoman tata laksana layanan terhadap fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD					



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kualitas perencanaan belum maksimal					
	Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi					
	Minimnya komitmen terhadap jadwal dan rencana kerja DPRD yang sudah ditetapkan					
	Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan oleh anggota DPRD					

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Jika dikaitkan dengan permasalahan pelayanan terhadap tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi isu Sekretariat DPRD Kota Balikpapan adalah: “Penguatan pelayanan Sekretariat DPRD untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD Kota Balikpapan”.

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Tahun 2025–2029, Dinas Perdagangan memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola perdagangan yang sehat, berdaya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Visi dan Misi RPJMD Kota Balikpapan 2025-2029 dimana arah pembangunan Kota Balikpapan berdasarkan Visi Walikota Terpilih yaitu **“Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman”**. Visi tersebut mencerminkan Kota Balikpapan sebagai kota maju berperadapan tinggi yang nyaman dihuni dengan spriritualitas yang mewarnai seluruh aktifitas penduduk kota. Dalam kallimat visi tersebut terdapat tiga kata kunci yaitu kota global, nyaman untuk semua, dan madinatul iman. Berikut penjelasan masing-masing dari kata kunci visi:

###### **1. Kota Global**

Kota global merujuk pada kondisi yang mencerminkan Kota Balikpapan yang maju, modern, tangguh, inovatif, dan setara dengan kemajuan kota besar yang ada didunia. Kota global juga mencerminkan kesinambungan pembangunan yang semakin progresif diberbagai bidang seperti ekonomi, infrastruktur, sosial budaya, lingkungan, dan pelayanan publik. Kota Balikpapan sendiri memiliki posisi dan peran penting dalam pembangunan regional, nasional, maupun global. Balikpapan mendukung peran pembangunan wilayah Pulau Kalimantan sebagai *Superhub* Ekonomi Nusantara untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di kawasan Timur Indonesia. Sebagai Kawasan Perkotaan Besar, Kota Balikpapan juga memiliki peran besar terhadap pusat perdagangan barang dan jasa, serta industri yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

###### **2. Nyaman untuk Semua**

Nyaman untuk semua mencerminkan upaya menciptakan lingkungan, layanan, dan kebijakan yang dapat dinikmati dan diakses oleh semua kalangan tanpa memandang latar belakang, fisik, usia, dan status sosial. Nyaman untuk semua bertujuan untuk memastikan pembangunan berjalan secara inklusif yang berfokus pada kenyamanan dan aksesibilitas bagi setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk semua juga merujuk pada realitas sosiokultural bahwa masyarakat Balikpapan yang cukup heterogen dan multikultur, sehingga menjadikan Kota Balikpapan sebagai kota milik bersama yang inklusif, damai dan kondusif.

###### **3. Madinatul Iman**

Madinatul Iman merujuk kepada aspek spiritualitas yang mewarnai seluruh aktivitas penduduk Kota Balikpapan. Sebagai aspek spiritual, konsep madinatul iman memiliki lima prinsip sebagai berikut:

- Spiritualitas menjadi roh dari seluruh kegiatan masyarakat
- Manusia dengan spiritualitas menjadi pusat pembangunan
- Seluruh masyarakat ikut terlibat aktif dalam perencanaan dan implementasi rencana kota
- Transparansi dalam seluruh kegiatan masyarakat dan pemerintah
- Kolaborasi/kerjasama lebih diprioritaskan daripada kompetisi disegala aspek kehidupan

Guna menjamin terlaksananya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025–2029, setiap Perangkat Daerah memiliki peran penting dalam mengoordinasikan, melaksanakan, serta memaksimalkan berbagai program dan kegiatan strategis sesuai tugas dan kewenangannya. Upaya tersebut diperkuat melalui penetapan tujuan Perangkat Daerah yang sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025–2029. Tujuan dimaknai sebagai kondisi yang ingin dicapai dalam rentang waktu lima tahun. Oleh karena itu, perumusannya harus memenuhi kriteria terukur dalam periode lima tahunan, dituliskan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Kota Balikpapan dengan luas wilayah 503,3 km yang terdiri dari 6 kecamatan dan 34 kelurahan memiliki 45 anggota DPRD sebagai perwakilan dari masing-masing dapil dituntut agar lebih lebih responsif, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD dituntut agar selalu meningkatkan kualitas dukungan dalam memfasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD secara konsisten.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Berdasarkan beberapa penelitian yang khusus menelaah kinerja Sekretariat DPRD menyebutkan bahwa faktor utama yang menghambat kinerja Sekretariat DPRD adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dalam kuantitas maupun kualitas serta kurangnya koordinasi dan konsolidasi (Noor & Rande, 2025). Selain itu beberapa kajian atau penelitian juga menyebut bahwa kerangka kerja sekretariat (administrasi, rapat, tenaga ahli, kunjungan tamu) sering belum memiliki standar pelayanan baku (Afandi, 2024). Beberapa penelitian tersebut sejalan dengan

permasalahan pada Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yang telah dijelaskan pada di Bab sebelumnya.

Sehingga, dalam rangka mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan tahun 2025-2029 yang menetapkan Tujuan yang ingin dicapai yaitu **“Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas”** serta dengan Sasaran yang ditetapkan yaitu **“Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas”**. Sekretariat DPRD merupakan unit layanan sehingga berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Maka ditetapkan tujuan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yang diselaraskan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Balikpapan tahun 2025-2029 yaitu **“Meningkatnya kualitas dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD”**. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan. Selanjutnya pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang memperhatikan kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond*, dan *continously improve* (SMART-C). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Perumusan tujuan dan sasaran rencana strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan tidak boleh bertentangan dengan dan harus mendukung tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Balikpapan beserta indikator kinerjanya yang hendak dicapai dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<b>SASARAN RPJMD:</b> Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD		Indeks kepuasan DPRD	Mengukur indeks kepuasan fasilitasi DPRD	Nilai survey kepuasan fasilitasi DPRD	74,51	74,86	75,17	75,50	75,83	76,16	76,5	Mengacu pada Permendagri No. 14 tahun 2017 ttg pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik
		Meningkatnya fasilitasi tugas dan fungsi DPRD yang efektif dan efisien	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi sesuai dengan standar	Pengukuran yang mengkompilasi berbagai aspek dalam fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, seperti pembahasan raperda, pengesahan dokumen penganggaran, dan peran pengawasan DPRD	Komposit = 40% fasilitasi dukungan fungsi legislasi DPRD + 30% fasilitasi dukungan fungsi penganggaran DPRD + 30% fasilitasi dukungan fungsi pengawasan DPRD	71,84%	74,04%	75,48%	78,21%	79,17%	81,49%	82,69%	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria:	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah oleh Inspektorat	74,77	74,95	75,25	75,55	75,95	76,45	77,00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Instansi Pemerintah		AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)									

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 tersebut diatas dapat menunjukan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Penetapan tujuan “Meningkatnya kualitas dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD” dilandaskan atas dasar mandat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 bahwa Sekretariat DPRD bukan pelaksana fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara langsung, tetapi penyedia dukungan bagi DPRD. Maka, yang bisa ditingkatkan oleh Sekretariat adalah kualitas layanan pendukung—bukan capaian substantif produk legislatif DPRD. Tujuan ini menggambarkan kondisi jangka menengah (5 tahun): layanan Sekretariat yang semakin efektif, cepat, responsif, transparan, dan profesional dalam menunjang kerja DPRD.

Penggunaan indikator “Indeks Kepuasan DPRD” relevan untuk mengukur tujuan yang telah ditetapkan. Karena Sekretariat DPRD merupakan unit layanan, maka pihak yang menerima layanan adalah Anggota DPRD dan Fraksi. Mereka adalah kustomer internal. Indikator berbasis kepuasan pengguna (*user satisfaction*) sangat lazim digunakan di unit layanan publik. Jika DPRD memberikan umpan balik dengan menilai kepuasannya meningkat, maka berarti kualitas

layanan Sekretariat DPRD membaik dan meningkat. Indikator tersebut dapat mengukur tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut.

- 1) Memiliki parameter yang jelas, dengan minimum aspek yang dinilai: ketepatan waktu layanan, kualitas bahan rapat dan dokumentasi, dukungan administrasi dan protokoler, penyediaan informasi dan data, dukungan fasilitasi alat kelengkapan.
- 2) Menggunakan skala pengukuran yang terstandarisasi yaitu dengan menggunakan skala Likert 1–5 yang diproses menjadi indeks.
- 3) Responden kredibel dari Anggota DPRD / Pimpinan Fraksi / Alat Kelengkapan Dewan sebagai pengguna layanan.
- 4) Dilakukan secara berkala dan kontinu yang idealnya dilaksanakan pengukuran tiap tahun sebagai indikator kinerja tahunan.

Kemudian, dari tujuan perangkat daerah perlu diturunkan ke dalam sasaran perangkat daerah yang berfungsi sebagai bentuk penjabaran, penurun, atau penerjemah dari tujuan tersebut agar menjadi lebih operasional, spesifik, dan terukur. Hubungan antara tujuan dan sasaran bersifat hierarkis dan logis, di mana tujuan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai secara umum dalam jangka menengah, sedangkan sasaran menjelaskan hasil yang lebih konkret dan dapat diukur sebagai tahapan menuju tercapainya tujuan. Dengan demikian, sasaran perangkat daerah merupakan turunan langsung dari tujuan, yang menjembatani antara arah kebijakan strategis dan pelaksanaan program atau kegiatan. Tanpa adanya sasaran yang jelas dan terukur, tujuan akan sulit diwujudkan secara efektif karena tidak memiliki indikator keberhasilan yang dapat diukur secara objektif. Oleh karena itu, perumusan sasaran harus mencerminkan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan, baik dari sisi hasil (outcome) maupun dari sisi dampak (impact).

Dalam mewujudkan tujuan “Meningkatnya kualitas dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD” Sekretariat DPRD menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu “Meningkatnya fasilitasi tugas dan fungsi DPRD yang efektif dan efisien” dan “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”.

Sasaran strategis ke-1 yaitu “Meningkatnya fasilitasi tugas dan fungsi DPRD yang efektif dan efisien” menjabarkan bahwa ketika fasilitasi semakin efektif dan efisien, maka kualitas dukungan akan meningkat. Efektif yang dimaksud dapat diartikan sebagai layanan tepat sesuai kebutuhan DPRD, mendukung tercapainya output kerja DPRD, dan minimnya hambatan administratif yang mengganggu pelaksanaan fungsi DPRD. Efisien dapat diartikan sebagai penggunaan anggaran yang optimal, penjadwalan yang tepat, proses administrasi yang tidak berbelit, dan pemanfaatan TIK untuk mempercepat layanan. Ketika seluruh aspek ini dapat diterapkan maka pimpinan dan anggota DPRD dapat merasakan

peningkatan kualitas dukungan oleh Sekretariat DPRD. Sasaran strategis, ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi sesuai dengan standar (%). Sehingga, penetapan sasaran ini dinilai tepat dan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan perangkat daerah, karena:

1. Fasilitasi adalah inti dari dukungan Sekretariat.
2. Efektivitas dan efisiensi merupakan dimensi utama kualitas layanan.
3. Sasaran memberikan pengukuran tahunan terhadap tujuan jangka menengah.
4. Semakin efektif dan efisien fasilitasi, semakin tinggi kualitas dukungan yang dirasakan DPRD.

Sasaran strategis ke-2 yaitu “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” berperan penting dalam mendukung tercapainya tujuan yang ditetapkan karena akuntabilitas kinerja merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi hasil.

Akuntabilitas kinerja yang berkualitas mencerminkan kemampuan perangkat daerah, dalam hal ini Sekretariat DPRD, untuk merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan mempertanggungjawabkan setiap program dan kegiatan secara sistematis serta berbasis pada hasil (*outcome*). Dengan meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja, seluruh proses dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, baik fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan dapat dilakukan secara lebih terarah, efisien, dan sesuai dengan prinsip *good governance*. Peningkatan akuntabilitas juga mendorong optimalisasi penggunaan sumber daya, memperkuat koordinasi antarbagian, serta memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD benar-benar memberikan nilai tambah bagi efektivitas kerja DPRD sebagai lembaga representasi rakyat. Melalui penerapan sistem akuntabilitas yang baik, Sekretariat DPRD dapat menunjukkan kinerja yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan, profesionalitas, dan kualitas pelayanan dukungan kepada DPRD. Sasaran strategis, ini diukur dengan menggunakan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Sehingga, peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja bukan hanya memperbaiki aspek administratif atau pelaporan semata, tetapi juga memastikan bahwa setiap bentuk fasilitasi, dukungan teknis, maupun pelayanan yang diberikan benar-benar selaras dengan kebutuhan dan prioritas DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara efektif.



### **3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

#### **3.2.1. Strategi**

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang,
2. Didasarkan pada capaian kinerja pembangunan,
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan
4. Terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah. Adapun penahanan rencana strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3. 2**  
**Penahapan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan**

<b>TAHAP I (2026)</b>	<b>TAHAP II (2027)</b>	<b>TAHAP III (2028)</b>	<b>TAHAP IV (2028)</b>	<b>TAHAP V (2030)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan aspek kelembagaan Sekretariat DPRD dalam menjalankan dukungan tugas dan fungsi DPRD Kota Balikpapan	Peningkatan Kapasitas Aparatur Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD dalam menjalankan dukungan tugas dan fungsi DPRD Kota Balikpapan	Akselerasi pengkoordinasian lintas Sektoral dalam menjalankan dukungan tugas dan fungsi DPRD Kota Balikpapan	Pemantapan sarana dan prasarana penunjang urusan Sekretariat DPRD dalam menjalankan dukungan tugas dan fungsi DPRD Kota Balikpapan	Kesinambungan Aspek kelembagaan, Sumber daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta pengkoordinasian lintas sektoral dalam menjalankan dukungan tugas dan fungsi DPRD Kota Balikpapan

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

### **3.2.2. Arah Kebijakan**

Sekretariat DPRD Kota Balikpapan hadir karena adanya lembaga DPRD Kota Balikpapan. Sehingga berbagai langkah kebijakan dan strategi yang diambil harus selaras dengan DPRD Kota Balikpapan. Hal tersebut menjadi penting karena kebijakan dan strategi yang diambil oleh pimpinan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan harus mendukung kinerja DPRD Kota Balikpapan. Selain itu penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

**Tabel 3. 3**  
**Rumusan Arah Kebijakan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan**

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kota	Perbaikan Tata Kelola Kelembagaan dan Birokrasi	1) Modernisasi layanan kesekretariatan berbasis teknologi informasi. 2) Penataan sistem arsip dan dokumentasi secara terstandar dan terintegrasi. 3) Penguatan budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi hasil. 4) Peningkatan koordinasi internal antarbagian untuk mendukung kelancaran tugas DPRD	
2	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kota		1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan DPRD. 2) Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang konsisten di bidang keuangan. 3) Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan DPRD.	
3	Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kota		1) Penguatan manajemen agenda rapat yang terencana dan responsif terhadap dinamika politik daerah 2) Pengembangan sistem informasi penjadwalan dan notulensi rapat digital. 3) Penguatan fungsi fasilitasi rapat dengan sarana prasarana yang modern dan ramah teknologi 4) Peningkatan kualitas pelayanan protokoler yang profesional dan responsif	

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD		1) Penyediaan tenaga ahli sesuai kebutuhan alat kelengkapan DPRD dengan kompetensi yang relevan dan mumpuni 2) Optimalisasi peran tenaga ahli dalam analisis kebijakan dan penyusunan produk hukum 3) Peningkatan kolaborasi antara tenaga ahli, sekretariat, dan alat kelengkapan DPRD	
5	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi		1) Penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil (result-based monitoring). 2) Implementasi manajemen risiko untuk mengantisipasi hambatan pelaksanaan program dan kegiatan 3) Evaluasi berkala terhadap pencapaian target Renstra 4) Penyusunan laporan kinerja yang lebih informatif, analitis, dan berbasis data	

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

## **BAB IV**

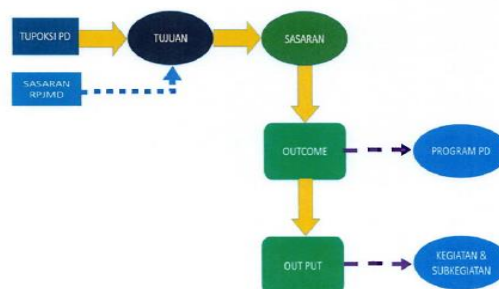
### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta Pendanaan**

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut, maka diperlukan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan yang berdasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang harus ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan indikator atau outcome program beserta target capaiannya dan pagu indikatif yang mencerminkan kebutuhan anggaran dalam melaksanakan program yang direncanakan. Indikator atau outcome program merupakan suatu keluaran yang dapat langsung digunakan atau hasil nyata dari suatu keluaran dan juga mencerminkan berfungsinya keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program- program yang tertuang dalam visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, Sekretariat DPRD Kota Balikpapan menyusun Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.

Program, kegiatan, sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output dan telah mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam peraturan Menteri dalam negeri beserta pemukhtahirannya. Daftar program, kegiatan dan sub kegiatan pada renstra 2025-2029 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Sekretariat DPRD yaitu pijakan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD pada tiap tahunnya hingga tahun 2030.



**Gambar 4. 1**

**Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan  
Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan**

Sumber: Instruksi Menteri Dalam Neger Nomor 2 Tahun 2025

Adapun pada Renstra 2025-2029 ini, terdapat 2 (dua) program yang mendukung pencapaian target, sasaran dan strategi Sekretariat DPRD yaitu:

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, yang terdiri dari 8 Kegiatan dan 37 sub kegiatan.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 9 Kegiatan dan 28 sub kegiatan.

Program-program tersebut merupakan amanat dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah.

Dalam pelaksanaan program pada setiap perangkat daerah, sangat penting untuk menetapkan outcome atau sasaran program sebagai arah pencapaian yang jelas. Penetapan outcome ini berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program, sehingga setiap kegiatan yang dijalankan dapat terukur kontribusinya terhadap tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, keberadaan sasaran program juga memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dapat dilakukan secara sistematis dan akuntabel. Dengan outcome yang terdefinisi dengan baik, perangkat daerah dapat mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan efektivitas program, serta memastikan bahwa setiap intervensi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Untuk mengukur pencapaian Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, maka ditetapkan outcome program yaitu “Meningkatnya Dukungan Fasilitasi Terhadap Agenda DPRD Sebagai Fungsi Legislasi, Budgeting, dan Pengawasan” yang merupakan turunan langsung dan sekaligus instrumen operasional dari sasaran strategis “Meningkatnya Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD yang Efektif dan Efisien”. Keterkaitan antara keduanya bersifat fungsional dan hierarkis, di mana sasaran program berperan sebagai upaya konkret untuk mewujudkan sasaran strategis yang bersifat lebih luas dan berjangka menengah. Sasaran strategis menitikberatkan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi fasilitasi terhadap keseluruhan tugas dan fungsi DPRD, sedangkan sasaran program berfokus pada pelaksanaan dukungan nyata terhadap tiga fungsi utama DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran (budgeting) dan pengawasan.

Melalui peningkatan dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD pada ketiga fungsi tersebut, Sekretariat DPRD dapat menyediakan pelayanan administratif, teknis, dan koordinatif yang lebih tepat sasaran, profesional, serta berorientasi hasil. Hal ini mencakup peningkatan kualitas perencanaan rapat kerja, penyediaan data dan informasi yang akurat, dukungan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi

pembahasan anggaran, serta pendampingan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah. Peningkatan dukungan fasilitasi ini akan berimplikasi langsung pada peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi DPRD, karena setiap proses kegiatan dewan difasilitasi secara tepat waktu, sesuai kebutuhan, dan dengan mutu layanan yang optimal. Di sisi lain, efisiensi juga akan tercapai melalui pengelolaan sumber daya, anggaran, dan waktu kerja yang lebih terencana serta berpedoman pada prinsip tata kelola yang baik.

Dengan demikian, keberhasilan sasaran program “Meningkatnya Dukungan Fasilitasi terhadap Agenda DPRD Sebagai Fungsi Legislasi, Budgeting dan Pengawasan” menjadi indikator nyata tercapainya sasaran strategis “Meningkatnya Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD yang Efektif dan Efisien.” Keduanya memiliki hubungan sebab-akibat yang kuat, di mana perbaikan kualitas fasilitasi terhadap agenda DPRD secara langsung memperkuat kapasitas lembaga DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.

Dalam mengukur tercapainya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, maka ditetapkan outcome yang ingin dicapai yaitu “Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah”. Outcome ini memiliki hubungan yang sangat erat dan bersifat langsung dengan sasaran strategis “Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.” Keterkaitan tersebut dapat dijelaskan melalui hubungan kausal dan sistemik antara kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pada dasarnya, akuntabilitas kinerja yang baik tidak dapat tercapai tanpa adanya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi hasil. Sasaran program ini menitikberatkan pada empat aspek utama yaitu pelayanan, perencanaan, pengukuran dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Aspek tersebut seluruhnya merupakan komponen pembentuk utama dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Melalui peningkatan kualitas pelayanan, perangkat daerah dapat membangun budaya kerja yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan. Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang berkualitas akan memastikan bahwa setiap kegiatan pemerintah daerah selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan efisien menciptakan dasar bagi akuntabilitas fiskal yang kuat. Sementara itu, peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah menjamin bahwa setiap hasil yang dicapai dapat diukur, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan secara objektif.

Dengan meningkatnya efektivitas dalam keempat aspek tersebut, maka kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh semakin kuatnya sistem

manajemen kinerja, meningkatnya integritas pelaporan, serta terbangunnya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang lebih komprehensif. Akhirnya, kondisi ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, berorientasi hasil, dan akuntabel.

Keterkaitan antara sasaran kegiatan dan sasaran program perangkat daerah merupakan komponen fundamental dalam memastikan efektivitas penyelenggaraan pembangunan daerah. Setiap sasaran kegiatan pada dasarnya dirancang sebagai bagian operasional yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian sasaran program yang bersifat lebih strategis. Oleh karena itu, keselarasan antara keduanya perlu dirumuskan dengan jelas agar alur perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja dapat berjalan secara terarah dan terukur.



Adapun rumusan Program, Kegiatan serta Subkegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 secara rinci tertuang dalam tabel 4.1 sebagai berikut.

**Tabel 4. 1**  
**Rumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD</b>							
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya kualitas dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD				Indeks Kepuasan DPRD (Indeks)		
		Meningkatnya fasilitasi tugas dan fungsi DPRD yang efektif dan efisien			Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terasilitasi Sesuai dengan Standar (%)		
			Meningkatnya Dukungan Fasilitasi Terhadap Agenda DPRD Sebagai Fungsi Legislasi, Budgeting dan Pengawasan		Persentase Fasilitasi Pembahasan Raperda sesuai Standar (%)	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
					Persentase Fasilitasi Pengesahan Dokumen Penganggaran Tepat Waktu (%)	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
					Persentase Fasilitasi Agenda Pengawasan DPRD sesuai Standar (%)	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
				Terlaksananya pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
					Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
					Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
					Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	
					Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	4.02.02.2.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD	
				Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran Secara Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	4.02.02.2.02.0005 - Pembahasan Laporan Semester	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
				Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
					Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	4.02.02.2.03.0003 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	4.02.02.2.03.0005 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	4.02.02.2.03.0006 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	4.02.02.2.03.0007 - Pengawasan Penggunaan Anggaran	
					Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan  Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
				Terlaksananya fasilitas peningkatan kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04.0001 - Orientasi DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD	
					Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
					Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	4.02.02.2.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Program Kerja DPRD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD	
					Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Orang)	4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
					Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Orang)	4.02.02.2.05.0004 - Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	
				Terlaksananya Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
					Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	4.02.02.2.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD	
				Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	4.02.02.2.07 - Pembahasan Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	4.02.02.2.07 - Pembahasan Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	4.02.02.2.07.0001 - Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	4.02.02.2.07.0002 - Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	
				Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	4.02.02.2.08 - Fasilitas Tugas DPRD	
					Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	4.02.02.2.08.0002 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	4.02.02.2.08.0003 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.08.0004 - Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	4.02.02.2.08.0005 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terwujudnya profesionalisme aparatur perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terwujudnya layanan umum perkantoran perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terwujudnya operasional umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				berfungsi optimal			
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terwujudnya pengelolaan laporan administrasi keuangan DPRD serta fasilitas kesejahteraan yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
					Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	
				Terselenggaranya Dukungan Administrasi dan Tersedianya Sarana Prasarana Kerja Untuk Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD (Laporan)	4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	4.02.01.2.16.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD (Laporan)	4.02.01.2.16.0002 - Fasilitas Fraksi DPRD	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	4.02.01.2.16.0003 - Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.16.0004 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Pendanaan merupakan salah satu aspek fundamental dalam proses penyusunan Renstra karena berpengaruh langsung terhadap kemampuan perangkat daerah dalam mewujudkan program dan kegiatan strategis yang telah direncanakan. Ketersediaan dan ketepatan alokasi anggaran akan menentukan tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pendanaan harus diselaraskan secara konsisten dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Balikpapan agar setiap program yang dirumuskan memiliki dukungan anggaran yang memadai dan terukur.

Dalam proses perencanaan Renstra, pendanaan disusun secara sistematis melalui identifikasi kebutuhan anggaran pada setiap program, kegiatan, dan subkegiatan. Tahapan ini mencakup pemetaan berbagai sumber pembiayaan, baik yang bersumber dari APBD, APBN, hibah, maupun sumber pendanaan lain yang sah, serta mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah. Selanjutnya, hasil pemetaan tersebut dituangkan dalam kerangka pendanaan yang realistis, efisien, dan berkelanjutan guna menjamin kesinambungan pelaksanaan program selama periode Renstra.

Pendanaan yang direncanakan secara tepat tidak hanya mencerminkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, keterpaduan antara perencanaan strategis dan penganggaran menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa implementasi Renstra dapat berjalan secara optimal, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi penerima manfaat pelayanan.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan Sekretariat DPRD secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

**Tabel 4. 2**  
**Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan serta Pendanaan**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02 - SEKRETARIAT DPRD				140.319.469.000		144.529.053.000		151.755.506.000		154.790.616.000		159.434.334.000		
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				75.077.906.190		79.001.000.000		82.830.506.000		86.805.000.000		91.084.334.000		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	86,97	87,5	75.077.906.190	88	79.001.000.000	88,5	82.830.506.000	89	86.805.000.000	89,5	91.084.334.000	4.02.0.00.0.00.0 1.0000 - SEKRETARIAT DPRD	Target disusun berdasarkan baseline realisasi
4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				59.998.740		68.000.000		70.000.000		70.000.000		72.000.000		
Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	0	59.998.740	5	68.000.000	5	70.000.000	6	70.000.000	5	72.000.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	0		5		5		5		6			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3	3		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3	3		0		0		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		0		0		0		0			
4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		51.000.000		52.500.000		52.500.000		54.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	0	0	5	51.000.000	5	52.500.000	5	52.500.000	6	54.000.000		5 dok (Renja, Renja Perubahan, RTP, dokumen PPRG, Rencana Aksi)
4.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				14.999.685		0		0		0		0		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	14.999.685	0	0	0	0	0	0	0	0		RKA Murni
4.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				14.999.685		0		0		0		0		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3	3	14.999.685	0	0	0	0	0	0	0	0		RKA Perubahan, RKA Pergeseran Tahap I, RKA Pergeseran Tahap II
4.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				14.999.685		0		0		0		0		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	14.999.685	0	0	0	0	0	0	0	0		DPA Murni
4.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan				14.999.685		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3	3	14.999.685	0	0	0	0	0	0	0	0		DPA Perubahan, DPA Pergeseran Tahap I, DPA Pergeseran Tahap II
4.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		17.000.000		17.500.000		17.500.000		18.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	0	0	5	17.000.000	5	17.500.000	6	17.500.000	5	18.000.000		6 dok evaluasi (Renstra, Renja, Renja Perubahan, Register Risiko, PPRG, LAKIP)
4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.500.000.000		8.925.000.000		9.805.506.000		10.050.000.000		10.332.334.000		
Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	66	8.500.000.000	938	8.925.000.000	980	9.805.506.000	1.008	10.050.000.000	1.022	10.332.334.000		
4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.500.000.000		8.925.000.000		9.805.506.000		10.050.000.000		10.332.334.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	66	8.500.000.000	82	8.925.000.000	86	9.805.506.000	88	10.050.000.000	92	10.332.334.000		Target merupakan jumlah ASN x 14 Bulan
4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.364.016.150		1.883.000.000		2.555.000.000		2.675.000.000		2.555.000.000		
Terwujudnya profesionalisme aparatur perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	31	56	1.364.016.150	3	1.883.000.000	3	2.555.000.000	3	2.675.000.000	3	2.555.000.000		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	0	0		154		196		196		196			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	3		1		1		2		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				193.922.000		70.000.000		80.000.000		200.000.000		80.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	3	193.922.000	1	70.000.000	1	80.000.000	2	200.000.000	1	80.000.000		Paket Pakaian Dinas ASN
4.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				1.170.094.150		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	31	56	1.170.094.150	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000		Jumlah orang yang mengikuti orientasi/diklat
4.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0		1.763.000.000		2.425.000.000		2.425.000.000		2.425.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	0	0	0	154	1.763.000.000	196	2.425.000.000	196	2.425.000.000	196	2.425.000.000		Jumlah orang yang mengikuti Bimtek (orang x kegiatan)
4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				7.906.309.600		8.825.000.000		8.825.000.000		7.825.000.000		8.225.000.000		
Terwujudnya layanan umum perkantoran perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	1	7.906.309.600	3	8.825.000.000	3	8.825.000.000	3	7.825.000.000	3	8.225.000.000		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	3		8		8		6		6			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	13	4		13		10		8		8			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	57		57		89		89		89			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	295	370		400		400		400		400			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	9	4		6		6		4		6			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		Jumlah paket pengadaan
4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.306.309.600		1.350.000.000		1.250.000.000		900.000.000		900.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	3	1.306.309.600	8	1.350.000.000	8	1.250.000.000	6	900.000.000	6	900.000.000		Jumlah paket pengadaan
4.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.100.000.000		1.100.000.000		900.000.000		650.000.000		650.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	13	4	1.100.000.000	13	1.100.000.000	10	900.000.000	8	650.000.000	8	650.000.000		Jumlah paket pengadaan
4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.500.000.000		1.750.000.000		1.750.000.000		1.400.000.000		1.750.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	9	4	1.500.000.000	6	1.750.000.000	6	1.750.000.000	4	1.400.000.000	6	1.750.000.000		Jumlah paket pengadaan
4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang				150.000.000		200.000.000		200.000.000		150.000.000		200.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Cetakan dan Penggandaan														
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	1	150.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	150.000.000	3	200.000.000		Jumlah paket pengadaan
4.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				250.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4	250.000.000	4	275.000.000	4	275.000.000	4	275.000.000	4	275.000.000		Jumlah dokumen pengadaan
4.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				3.000.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	295	370	3.000.000.000	400	3.500.000.000	400	3.500.000.000	400	3.500.000.000	400	3.500.000.000		Jumlah laporan fasilitasi tamu
4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500.000.000		500.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	57	500.000.000	57	500.000.000	89	800.000.000	89	800.000.000	89	800.000.000		Jumlah laporan Koordinasi SKPD
4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				780.000.000		900.000.000		1.300.000.000		2.150.000.000		900.000.000		
Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	780.000.000	0	900.000.000	1	1.300.000.000	4	2.150.000.000	0	900.000.000		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	4		4		4		4					
4.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		400.000.000		1.250.000.000		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	1	400.000.000	4	1.250.000.000	0	0		Jumlah pengadaan kendaraan dinas Jabatan
4.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				780.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	4	780.000.000	4	900.000.000	4	900.000.000	4	900.000.000	4	900.000.000		Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional
4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.500.000.000		6.100.000.000		6.100.000.000		6.100.000.000		6.100.000.000		
Terwujudnya operasional umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	65	8.500.000.000	65	6.100.000.000	65	6.100.000.000	65	6.100.000.000	65	6.100.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	36		36		36		36		36			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	18		24		24		24		24			
4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.500.000.000		1.750.000.000		1.750.000.000		1.750.000.000		1.750.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	36	1.500.000.000	36	1.750.000.000	36	1.750.000.000	36	1.750.000.000	36	1.750.000.000		Jasa Listirk, Air, Internet x 12 bulan
4.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				250.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	18	250.000.000	24	600.000.000	24	600.000.000	24	600.000.000	24	600.000.000		Jasa yang disediakan x 12 bulan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	yang Disediakan (Laporan)													
4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				6.750.000.000		3.750.000.000		3.750.000.000		3.750.000.000		3.750.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	65	6.750.000.000	65	3.750.000.000	65	3.750.000.000	65	3.750.000.000	65	3.750.000.000		Jasa yang disediakan x 12 bulan
4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.900.000.000		2.050.000.000		2.050.000.000		2.050.000.000		2.050.000.000		
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar berfungsi optimal	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	29	33	1.900.000.000	33	2.050.000.000	33	2.050.000.000	33	2.050.000.000	33	2.050.000.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i (Unit)	2	2				2		2		2			
4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.400.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	29	33	1.400.000.000	33	1.300.000.000	33	1.300.000.000	33	1.300.000.000	33	1.300.000.000		Kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional yang dipelihara
4.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				500.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i (Unit)	2	2	500.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000		Jumlah unit gedung yang dipelihara

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				39.167.581.700		45.025.000.000		46.825.000.000		47.050.000.000		47.450.000.000		
Terwujudnya pengelolaan laporan administrasi keuangan DPRD serta fasilitasi kesejahteraan yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	7	7	39.167.581.700	6	45.025.000.000	6	46.825.000.000	8	47.050.000.000	6	47.450.000.000		
	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	45	45		45		45		45					
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	36	45		45		45		45					
4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				38.135.000.000		43.500.000.000		45.175.000.000		45.175.000.000		45.675.000.000		
Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	45	45	38.135.000.000	45	43.500.000.000	45	45.175.000.000	45	45.175.000.000	45	45.675.000.000		Jumlah anggota DPRD
4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				854.460.000		1.300.000.000		1.400.000.000		1.600.000.000		1.500.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	7	7	854.460.000	6	1.300.000.000	6	1.400.000.000	8	1.600.000.000	6	1.500.000.000		Paket pengadaan pakaian dinas DPRD
4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				178.121.700		225.000.000		250.000.000		275.000.000		275.000.000		
Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	36	45	178.121.700	45	225.000.000	45	250.000.000	45	275.000.000	45	275.000.000		Jumlah anggota DPRD yang mengikuti medical checkup
4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD				6.900.000.000		5.225.000.000		5.300.000.000		8.835.000.000		13.400.000.000		
Terselenggaranya Dukungan Administrasi dan Tersedianya Sarana Prasarana Kerja Untuk Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)	7	6	6.900.000.000	6	5.225.000.000	6	5.300.000.000	6	8.835.000.000	6	13.400.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	200	60		140		140		200		200			
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	19	8		7		7		7		14			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	10	6		6		6		6		6			
4.02.01.2.16.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				100.000.000		275.000.000		300.000.000		310.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	10	6	100.000.000	6	275.000.000	6	300.000.000	6	310.000.000	6	350.000.000		Jumlah fasilitas administrasi keanggotaan DPRD
4.02.01.2.16.0002 - Fasilitas Fraksi DPRD				300.000.000		300.000.000		350.000.000		375.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD (Laporan)	7	6	300.000.000	6	300.000.000	6	350.000.000	6	375.000.000	6	300.000.000		Jumlah fasilitas fraksi DPRD
4.02.01.2.16.0003 - Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				500.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000		4.750.000.000		4.750.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	200	60	500.000.000	140	1.250.000.000	140	1.250.000.000	200	4.750.000.000	200	4.750.000.000		Rapat-rapat koordinasi DPRD
4.02.01.2.16.0004 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				6.000.000.000		3.400.000.000		3.400.000.000		3.400.000.000		8.000.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	19	8	6.000.000.000	7	3.400.000.000	7	3.400.000.000	7	3.400.000.000	14	8.000.000.000		Paket pekerjaan di rumah dinas DPRD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				65.241.562.810		65.528.053.000		68.925.000.000		67.985.616.000		68.350.000.000		
Meningkatnya Dukungan Fasilitasi Terhadap Agenda DPRD Sebagai Fungsi Legislasi, Budgeting dan Pengawasan	Persentase Fasilitasi Pembahasan Raperda sesuai Standar (%)	54,55	58,33	65.241.562.810	62,5	65.528.053.000	64	68.925.000.000	68	67.985.616.000	69,23	68.350.000.000	4.02.0.00.0.00.0 1.0000 - SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Raperda yang dibahas pada tahun berkenaan dibagi jumlah Raperda yang ditetapkan pada Propemperda tahun berkenaan dikali 100%
	Persentase Fasilitasi Pengesahan Dokumen Penganggaran Tepat Waktu (%)	100	100		100		100		100		100			Jumlah pengesahan dokumen penganggaran tepat waktu dibagi jumlah dokumen penganggaran yang di fasilitasi dikali 100%
	Persentase Fasilitasi Agenda Pengawasan DPRD sesuai Standar (%)	48,72	73,81		77,38		78,57		80,95		83,33			Jumlah dokumen output pengawasan yang telah difasilitasi dibagi Jumlah usulan agenda pengawasan yang difasilitasi dikali 100%
4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				8.750.000.000		11.450.000.000		12.875.000.000		11.700.000.000		11.400.000.000		
Terlaksananya pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	0	1	8.750.000.000	1	11.450.000.000	1	12.875.000.000	1	11.700.000.000	1	11.400.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	36	40		40		40		40		40			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	4	5		5		5		9		9			
	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan (Dokumen)	5	10		10		10		6		6			
4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program  Pembentukan Peraturan Daerah				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	5	5	50.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000		Dokumen Propempera yang disusun
4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				2.100.000.000		3.000.000.000		3.850.000.000		3.200.000.000		3.100.000.000		
Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	36	40	2.100.000.000	40	3.000.000.000	40	3.850.000.000	40	3.200.000.000	40	3.100.000.000		Dokumen Pembahasan Raperda
4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan				5.100.000.000		5.150.000.000		5.200.000.000		4.500.000.000		4.500.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan (Dokumen)	5	10	5.100.000.000	10	5.150.000.000	10	5.200.000.000	6	4.500.000.000	6	4.500.000.000		Dokumen Kajian Perundang- undangan
4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik				1.500.000.000		2.500.000.000		3.025.000.000		3.200.000.000		3.000.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	4	5	1.500.000.000	5	2.500.000.000	5	3.025.000.000	9	3.200.000.000	9	3.000.000.000		Dokumen Naskah Akademik
4.02.02.2.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD				0		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	0	1	0	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000		Tatib DPRD
4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran				4.417.042.800		4.700.000.000		4.880.000.000		5.110.000.000		5.150.000.000		
Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran Secara Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1	1	4.417.042.800	1	4.700.000.000	1	4.880.000.000	1	5.110.000.000	1	5.150.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS				515.000.000		800.000.000		850.000.000		880.000.000		900.000.000		
Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	1	1	515.000.000	1	800.000.000	1	850.000.000	1	880.000.000	1	900.000.000		KUA PPAS tahun berjalan
4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1.050.000.000		1.050.000.000		1.080.000.000		1.080.000.000		1.100.000.000		
Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	1	1	1.050.000.000	1	1.050.000.000	1	1.080.000.000	1	1.080.000.000	1	1.100.000.000		KUPA PPAS tahun berjalan
4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD				1.202.042.800		1.200.000.000		1.200.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000		
Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1	1	1.202.042.800	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	1	1.250.000.000	1	1.250.000.000		APBD tahun berjalan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		
Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.100.000.000	1	1.100.000.000		APBDP tahun berjalan
4.02.02.2.02.0005 - Pembahasan Laporan Semester				200.000.000		200.000.000		300.000.000		350.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	2	2	200.000.000	2	200.000.000	2	300.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000		Realisasi laporan per semester
4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		
Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000		Dokumen pertanggungjaw aban APBD
4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				19.460.000.000		19.550.000.000		20.070.000.000		20.315.616.000		20.270.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	10	40	19.460.000.000	40	19.550.000.000	40	20.070.000.000	40	20.315.616.000	40	20.270.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	19	40		40		40		40		40			
	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	25	40		40		40		40		40			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	29	40		40		40		40		40			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	2	5		5		5		5		5			
4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				4.800.000.000		4.850.000.000		4.900.000.000		4.950.000.000		4.950.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	19	40	4.800.000.000	40	4.850.000.000	40	4.900.000.000	40	4.950.000.000	40	4.950.000.000		Laporan pengawasan Komisi I
4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				4.400.000.000		4.500.000.000		4.600.000.000		4.650.000.000		4.650.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	10	40	4.400.000.000	40	4.500.000.000	40	4.600.000.000	40	4.650.000.000	40	4.650.000.000		Laporan pengawasan Komisi III
4.02.02.2.03.0003 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				4.330.000.000		4.400.000.000		4.500.000.000		4.600.000.000		4.600.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	25	40	4.330.000.000	40	4.400.000.000	40	4.500.000.000	40	4.600.000.000	40	4.600.000.000		Laporan pengawasan Komisi IV

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				4.400.000.000		4.500.000.000		4.600.000.000		4.650.000.000		4.650.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	29	40	4.400.000.000	40	4.500.000.000	40	4.600.000.000	40	4.650.000.000	40	4.650.000.000		Laporan pengawasan Komisi II
4.02.02.2.03.0005 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				50.000.000		100.000.000		220.000.000		165.616.000		120.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	2	5	50.000.000	5	100.000.000	5	220.000.000	5	165.616.000	5	120.000.000		Laporan pengawasan Komisi III
4.02.02.2.03.0006 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				880.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		700.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	1	1	880.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000		Laporan pengawasan LHP BPK
4.02.02.2.03.0007 - Pengawasan Penggunaan Anggaran				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		Laporan pengawasan Penggunaan Anggaran
4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keteranganm Pertanggungjawaban Kepala Daerah				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		Rekomendasi Pertanggungjaw aban Kepala Daerah
4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD				11.010.975.810		12.250.000.000		12.370.000.000		12.330.000.000		12.600.000.000		
Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	6	6	11.010.975.810	6	12.250.000.000	6	12.370.000.000	6	12.330.000.000	6	12.600.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	45	270		270		270		225		270			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	45	1		1		1		45		1			
	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	35	4.600		3.800		3.900		3.950		4.100			
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	5	7		9		9		9		9			
4.02.02.2.04.0001 - Orientasi DPRD				100.000.000		100.000.000		150.000.000		700.000.000		100.000.000		
Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	45	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	45	700.000.000	1	100.000.000		Orientasi DPRD PAW/ Masa Jabatan Baru
4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD				3.100.000.000		4.600.000.000		4.600.000.000		3.900.000.000		4.650.000.000		
Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	45	270	3.100.000.000	270	4.600.000.000	270	4.600.000.000	225	3.900.000.000	270	4.650.000.000		Anggota DPRD yang mengikuti bimtek x 5/6
4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				187.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	5	7	187.000.000	9	450.000.000	9	450.000.000	9	450.000.000	9	450.000.000		Jumlah kelompok pakar
4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				324.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	6	6	324.000.000	6	400.000.000	6	400.000.000	6	400.000.000	6	400.000.000		Jumlah tenaga ahli
4.02.02.2.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				265.000.000		350.000.000		370.000.000		380.000.000		400.000.000		
Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	0	4	265.000.000	4	350.000.000	4	370.000.000	4	380.000.000	4	400.000.000		Dokumen hasil kegiatan hubungan masyarakat
4.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Program Kerja DPRD				100.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000		Dokumen Renja DPRD
4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD				6.934.975.810		6.100.000.000		6.150.000.000		6.250.000.000		6.350.000.000		
Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	35	4.600	6.934.975.810	3.800	6.100.000.000	3.900	6.150.000.000	3.950	6.250.000.000	4.100	6.350.000.000		Jasa yang diberikan Publikasi dan Dokumentasi DPRD
4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				10.250.000.000		8.108.053.000		8.920.000.000		8.430.000.000		9.000.000.000		
Meningkatnya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	2	3	10.250.000.000	3	8.108.053.000	3	8.920.000.000	2	8.430.000.000	3	9.000.000.000		
	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Orang)	0	28.800		28.800		28.800		28.800		28.800			
4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				500.000.000		600.000.000		620.000.000		680.000.000		700.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	2	2	500.000.000	2	600.000.000	2	620.000.000	2	680.000.000	2	700.000.000		1 Pokir Murni, 1 Pokir Perubahan
4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses				4.750.000.000		3.008.053.000		3.500.000.000		2.950.000.000		3.500.000.000		
Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	2	3	4.750.000.000	3	3.008.053.000	3	3.500.000.000	2	2.950.000.000	3	3.500.000.000		3x Masa Sidang Reses
4.02.02.2.05.0004 - Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah				5.000.000.000		4.500.000.000		4.800.000.000		4.800.000.000		4.800.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Orang)	0	28.800	5.000.000.000	28.800	4.500.000.000	28.800	4.800.000.000	28.800	4.800.000.000	28.800	4.800.000.000		45 dewan x 8 sosialisasi x 80 orang/kegiatan
4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				750.050.165		750.000.000		790.000.000		950.000.000		980.000.000		
Terlaksananya Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	1	1	750.050.165	1	750.000.000	1	790.000.000	1	950.000.000	1	980.000.000		
	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
4.02.02.2.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD				100.050.165		200.000.000		220.000.000		600.000.000		650.000.000		
Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	0	1	100.050.165	1	200.000.000	1	220.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000		Dokumen Kode Etik Tata Beracara DPRD
4.02.02.2.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD				650.000.000		550.000.000		570.000.000		350.000.000		330.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	1	1	650.000.000	1	550.000.000	1	570.000.000	1	350.000.000	1	330.000.000		Dokumen Pengawasan Kode Etik Tata Beracara DPRD
4.02.02.2.07 - Pembahasan Kerja Sama Daerah				697.957.200		620.000.000		650.000.000		650.000.000		655.000.000		
Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	2	1	697.957.200	1	620.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	1	655.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
4.02.02.2.07.0001 - Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				300.000.000		260.000.000		270.000.000		270.000.000		275.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	2	1	300.000.000	1	260.000.000	1	270.000.000	1	270.000.000	1	275.000.000		Dokumen hasil fasilitasi kerja sama daerah
4.02.02.2.07.0002 - Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi				397.957.200		360.000.000		380.000.000		380.000.000		380.000.000		
Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	2	2	397.957.200	2	360.000.000	2	380.000.000	2	380.000.000	2	380.000.000		Dokumen bahan komunikasi DPRD
4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD				9.905.536.835		8.100.000.000		8.370.000.000		8.500.000.000		8.295.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	10	16	9.905.536.835	16	8.100.000.000	16	8.370.000.000	16	8.500.000.000	16	8.295.000.000		
	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	3	5		5		5		5		5			
4.02.02.2.08.0002 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD				542.961.750		450.000.000		450.000.000		450.000.000		250.000.000		
Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	1	1	542.961.750	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	250.000.000		Laporan Kinerja DPRD



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.02.2.08.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				5.300.000.200		5.500.000.000		5.700.000.000		5.800.000.000		5.800.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	10	16	5.300.000.200	16	5.500.000.000	16	5.700.000.000	16	5.800.000.000	16	5.800.000.000		Dokumen Fasilitasi Badan Musyawarah
4.02.02.2.08.0004 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				2.900.000.000		750.000.000		770.000.000		790.000.000		800.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	12	12	2.900.000.000	12	750.000.000	12	770.000.000	12	790.000.000	12	800.000.000		Dokumen fasilitasi Pimpinan DPRD
4.02.02.2.08.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				1.162.574.885		1.400.000.000		1.450.000.000		1.460.000.000		1.445.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	3	5	1.162.574.885	5	1.400.000.000	5	1.450.000.000	5	1.460.000.000	5	1.445.000.000		Dokumen Fasilit asi Pansus DPRD

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

4.2 Subkegiatan yang mendukung Program Prioritas Kepala Daerah

Program prioritas kepala daerah adalah program-program utama yang ditetapkan oleh kepala daerah untuk dilaksanakan dalam masa jabatannya, bertujuan untuk mengatasi isu strategis dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Program prioritas merupakan bentuk konkret dari janji politik dan arah kebijakan pembangunan selama masa jabatan kepala daerah tersebut. Program-program ini biasanya berdampak langsung pada pembangunan daerah dan kesejahteraan Masyarakat Adapun 9 Program Prioritas Kepala Daerah Periode 2025-2030 yaitu:

- 1. Transformasi Birokrasi
- 2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
- 3. Mengatasi Stunting
- 4. Penyediaan Air Bersih yang Sehat dan Merata
- 5. Pengendalian Banjir
- 6. Lingkungan Hidup dan Sosial yang Sehat dan Nyaman
- 7. Balikpapan Kota MICE dan Wisata
- 8. Balikpapan Kota Inovatif dan Kreatif
- 9. Balikpapan Kota Ramah Anak

Dalam hal ini Sekretariat DPRD sebagai unsur Penunjang Urusan Pemerintahan mendukung program prioritas pertama Kepala Daerah yaitu Transformasi Birokrasi. Sub kegiatan yang mendukung program prioritas adalah serangkaian aktivitas yang lebih spesifik dan terukur yang dirancang untuk mencapai tujuan utama atau program yang telah ditetapkan. Sub Kegiatan ini saling terkait dan berkontribusi pada pencapaian tujuan program secara keseluruhan. Adapun subkegiatan Sekretariat DPRD yang mendukung program Prioritas Perangkat Daerah tersebut dijabarkan pada tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4. 3  
Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD				
1.	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya Dukungan Fasilitasi Terhadap Agenda DPRD Sebagai Fungsi Legislasi, Budgeting dan Pengawasan	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
			4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
			4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
			4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	
			4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	
			4.02.02.2.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	
			4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS	
			4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD	
			4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan	
			4.02.02.2.02.0005 - Pembahasan Laporan Semester	
			4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
			4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
			4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	
			4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
			4.02.02.2.03.0003 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
			4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
			4.02.02.2.03.0005 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	
			4.02.02.2.03.0006 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	
			4.02.02.2.03.0007 - Pengawasan Penggunaan Anggaran	
			4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
			4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
			4.02.02.2.04.0001 - Orientasi DPRD	
			4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD	
			4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
			4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
			4.02.02.2.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
			4.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Program Kerja DPRD	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD	
			4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
			4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
			4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses	
			4.02.02.2.05.0004 - Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	
			4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
			4.02.02.2.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD	
			4.02.02.2.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD	
			4.02.02.2.07 - Pembahasan Kerja Sama Daerah	
			4.02.02.2.07.0001 - Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	
			4.02.02.2.07.0002 - Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	
			4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD	
			4.02.02.2.08.0002 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	
			4.02.02.2.08.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
			4.02.02.2.08.0004 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	
			4.02.02.2.08.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan. Hal ini dimaksudkan agar indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Sekretariat DPRD yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja suatu perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi . IKU ditetapkan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar berkontribusi pada pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah. Dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Balikpapan, Sekretariat DPRD berkontribusi untuk mewujudkan Tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4. 4  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD									
2.	Indeks Kepuasan DPRD	Poin	74,51	74,84	75,17	75,5	75,83	76,16	76,5	
3.	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi Sesuai dengan Standar	%	71,84	74,04	75,48	78,21	79,17	81,49	82,69	
4.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,77	74,95	75,25	75,55	75,95	76,45	77	

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Sedangkan, Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kinerja yang dipakai untuk memantau dan mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pada level unit kerja atau bidang tertentu yang mengacu pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tabel 4. 5  
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat DPRD

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
4.02 - SEKRETARIAT DPRD											
1.	Indeks Kepuasan DPRD	positif	Poin	74,51	74,84	75,17	75,5	75,83	76,16	76,5	
2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	positif	Nilai	74,77	74,95	75,25	75,55	75,95	76,45	77	
3.	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi Sesuai dengan Standar	positif	%	71,84	74,04	75,48	78,21	79,17	81,49	82,69	
4.	Persentase Fasilitasi Pembahasan Raperda sesuai Standar	positif	%	54,55	56,52	58,33	62,5	64	68	69,23	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	positif	Indeks	86,97	87	87,5	88	88,5	89	89,5	
6.	Persentase Fasilitasi Pengesahan Dokumen Penganggaran Tepat Waktu	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase Fasilitasi Agenda Pengawasan DPRD sesuai Standar	positif	%	48,72	71,43	73,81	77,38	78,57	80,95	83,33	

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan. Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan merupakan pedoman bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 akan tercapai apabila dijalankan dengan tanggungjawab moral, dedikasi yang tinggi, koordinasi, kerjasama dan keterpaduan/sinergisitas serta komitmen yang kuat dari segenap jajaran aparatur Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggungjawabnya guna mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif dalam melayani rakyat melalui reformasi birokrasi.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya.

Demikian Renstra ini kami susun, semoga dapat menjadi acuan kinerja Sekretariat DPRD sehingga visi misi Kota Balikpapan dapat tercapai dengan baik dan juga mencapai target sasaran kinerja yang diharapkan oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sendiri pada khususnya.

## W. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Renstra merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahun.

Renstra Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029. Renstra yang berlandaskan pada RPJMD Kota Balikpapan berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Wali Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun perangkat daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kota Balikpapan berkaitan dengan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan. Penyusunan Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan melalui tahapan yaitu diawali persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Dokumen Renstra harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan, yaitu RPJMD, Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Balikpapan. Keterkaitan tersebut juga harus mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah.

#### **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 6 E);
26. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Bappeda Litbang Kota Balikpapan untuk mewujudkan visi dan misi Wali Kota Balikpapan. Adapun tujuan penyusunan Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan gambaran kondisi Bappeda Litbang Kota Balikpapan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Wali Kota Balikpapan;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Bappeda Litbang Kota Balikpapan untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup pemetaan masalah, isu strategis, program/kegiatan/sub kegiatan, arah kebijakan, penahapan, tujuan dan sasaran, pendanaan serta sub kegiatan prioritas sebagai acuan dalam penyusunan Renja tahunan;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
4. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu lima tahun kedepan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA LITBANG KOTA BALIKPAPAN**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) serta dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Gambaran Pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan
  - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Litbang Kota Balikpapan
  - 2.1.2 Sumber Daya Bappeda Litbang Kota Balikpapan
  - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan
  - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Bappeda Litbang
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Bappeda Litbang Kota Balikpapan
  - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan
  - 2.2.2 Isu Strategis

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dijelaskan tujuan, sasaran jangka menengah serta dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam lima tahun mendatang.

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Strategi Perangkat Daerah
- 3.3 Arah Kebijakan

#### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Balikpapan.

4.1 Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

4.2 Program Pendukung Prioritas

4.3 Indikator Kinerja Utama

4.4 Indikator Kinerja Kunci

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bappeda Litbang Kota Balikpapan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA LITBANG KOTA BALIKPAPAN**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan**

Bappeda Litbang Kota Balikpapan merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, serta pengembangan inovasi daerah berbasis penelitian dan pengkajian. Kedudukan Bappeda Litbang sangat penting sebagai penggerak dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah yang terintegrasi, terukur, serta berorientasi pada pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Balikpapan.

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Litbang Kota Balikpapan**

Berdasarkan Lampiran XXV Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, berikut disajikan uraian tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kota Balikpapan:

#### **A. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan**

Kepala Bappeda Litbang mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja dibawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain tugas di atas, Kepala Bappeda Litbang melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi:
  - 1) RPJPD;
  - 2) RPJMD; dan
  - 3) RKPD.
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;
- c. pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- d. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- e. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- f. pengoordinasian serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- g. penyelenggaraan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- h. pengoordinasian dan pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi;
- i. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Bappeda Litbang Kota Balikpapan  
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian:

- a. perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
- b. administrasi keuangan;
- c. administrasi barang milik daerah pada badan;
- d. administrasi kepegawaian;
- e. administrasi umum;
- f. pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
- g. pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
- h. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;
- i. layanan informasi dan pengaduan; dan
- j. pembinaan pelayanan publik.

Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pengelolaan anggaran badan;
- e. pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah;
- f. pengoordinasian penyusunan dokumen laporan keuangan badan;
- g. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian perangkat daerah;
- h. pengelolaan urusan rumah tangga;
- i. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- j. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- k. pelaksanaan administrasi, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
- l. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
- m. pengoordinasian dan pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
- n. pembinaan dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik;
- o. pengelolaan survei kepuasan masyarakat;
- p. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- q. pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;
- r. pengoordinasian bidang dan UPTD;
- s. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- t. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat terdiri atas:

1. Subbagian Umum, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan administrasi barang milik Daerah pada perangkat daerah yang meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah pada badan;

- b. melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi sarana dan prasarana pegawai, pemngkatan kompetensi pegawai serta pembinaan pegawai;
  - c. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana dan prasarana kantor;
  - d. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan serta informasi layanan dan pengaduan;
  - e. memfasilitasi pembinaan tata kelola pelayanan publik;
  - f. memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
  - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
  - b. melaksanakan penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
  - c. melaksanakan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas aparatur sipil negara;
  - d. melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan badan;
  - e. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
  - f. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
  - g. mengoordinir pengelolaan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
  - h. menyusun laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
  - i. menyusun laporan keuangan;
  - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Substansi Program, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
    - 1) rencana strategis;
    - 2) rencana kerja;
    - 3) rencana kinerja tahunan;
    - 4) penetapan kinerja; dan
    - 5) laporan kinerja.
  - b. mengoordinasikan rencana usulan kebutuhan anggaran (penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah murni dan perubahan);
  - c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran (murni dan perubahan);
  - d. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program, kegiatan dan subkegiatan;
  - e. melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi kinerja program, kegiatan dan subkegiatan badan;

- f. menyusun laporan pelaksanaan kineija program, kegiatan dan subkegiatan badan;
- g. mengelola informasi dan dokumentasi serta pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;
- h. menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Bappeda Litbang Kota Balikpapan

1. Bidang Infrastruktur Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan, mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan Daerah di Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan, yang meliputi urusan pemerintah bidang:

- a. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. perhubungan;
- c. perumahan dan kawasan permukiman;
- d. komunikasi dan informatika;
- e. lingkungan hidup;
- f. pertanahan;
- g. energi sumber daya mineral;
- h. pariwisata;
- i. kepemudaan dan olahraga;
- j. perdagangan;
- k. penanaman modal;
- l. pangan;
- m. pertanian;
- n. kelautan dan penkanaan;
- o. perindustrian;
- p. koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- q. pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah.
- r. statistik; dan
- s. persandian.

Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan di bidang infrastruktur kewilayahan, perekonomian dan sumber daya alam;
- b. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur kewilayahan, perekonomian dan sumber daya alam;
- c. pengoordinasian, pensinkronisasian dan pembinaan penyusunan rencana pembangunan bidang infrastruktur kewilayahan, perekonomian dan sumber daya alam;
- d. pengoordinasian peyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur kewilayahan, perekonomian dan sumber daya alam;

- e. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur kewilayahan, perekonomian dan sumber daya alam;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur kewilayahan, perekonomian dan sumber daya alam;
- g. pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pengembangan infrastruktur kewilayahan, perekonomian dan sumber daya alam;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur, yang meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. sosia;
- d. tenaga kerja;
- e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. kebudayaan;
- i. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. perpustakaan;
- k. kecamatan;
- l. kepegawaian;
- m. pendidikan dan pelatihan;
- n. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan;
- o. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah;
- p. sekretariat daerah;
- q. inspektorat;
- r. perencanaan;
- s. penelitian dan pengembangan; dan
- t. kesatuan bangsa dan politik.

Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. pengoordinasian, pensinkronisasian dan pembinaan penyusunan rencana pembangunan bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia;
- d. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi perencanaan;
- f. pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;



- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- h. pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Pengendalian, Pembiayaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan, dan mengevaluasi rencana pembangunan daerah serta mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Bidang Pengendalian, Pembiayaan dan Pelaporan melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan bidang pengendalian, pembiayaan dan pelaporan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- c. pengoordinasian pengendalian dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengoordinasian pemantauan, evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- e. pengoordinasian penyusunan pelaporan, pemantauan dan evaluasi hasil perencanaan pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah;
- h. pengoordinasian penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya;
- i. pelaksanaan konsultasi publik dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- j. pelaksanaan analisis data dan informasi pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- k. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi dalam teknis penyusunan, perencanaan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah serta penyusunan laporan;
- l. pelaksanaan analisis pengelolaan dan pemutakhiran data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- m. pengoordinasian pengendalian pelaksanaan kerja sama daerah;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- o. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### 4. Bidang Penelitian dan Pembangunan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penelitian

dan pengembangan. Bidang Penelitian dan Pengembangan melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. perumusan kebijakan rencana pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pengoordinasian dan pembinaan rencana kegiatan penelitian dan pengembangan;
- d. pengoordinasian dan pensinkronisasian dengan perangkat daerah/instansi terkait dalam proses rencana kegiatan penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan penelitian dan survei data capaian hasil Pembangunan yang ditetapkan sebagai indikator kinerja utama daerah dan pengembangan;
- f. pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan administrasi kegiatan penelitian dan pengembangan;
- g. pelaksanaan penghimpunan data hasil kegiatan penelitian dan pengembangan;
- h. pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang penelitian dan pengembangan serta perumusan langkah kebijakannya;
- i. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkan izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- j. fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan;
- k. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang:
  1. penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
  2. sosial dan kependudukan; dan
  3. ekonomi dan pembangunan.
- l. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan perekayasa di bidang teknologi dan inovasi;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- n. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2024 telah terbit Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan Peraturan Daerah ini Bappeda Litbang berubah nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Bertipe A, yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Namun saat Renstra ini disusun Peraturan Walikota Balikpapan mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) masih dalam proses pembahasan. Sehingga tugas dan fungsi yang tersaji pada dokumen ini masih menggunakan peraturan terkait SOTK yang berlaku saat ini.

Selain itu, pada tahun 2021 telah terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi untuk Penyederhanaan Birokrasi. Hal tersebut menyebabkan adanya penyetaraan jabatan eselon IV ke jabatan fungsional yang setara. Adapun struktur organisasi Bappeda Litbang Kota Balikpapan dapat dilihat sebagaimana gambar dibawah ini:



**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Bappeda Litbang Kota Balikpapan**  
Sumber: Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022

**2.1.2 Sumber Daya Bappeda Litbang Kota Balikpapan**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kota Balikpapan harus dilaksanakan secara profesional, efektif dan efesien, sehingga perlu di dukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, aset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta di tetapkannya berbagai regulai oleh pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Bappeda Litbang Kota Balikpapan.

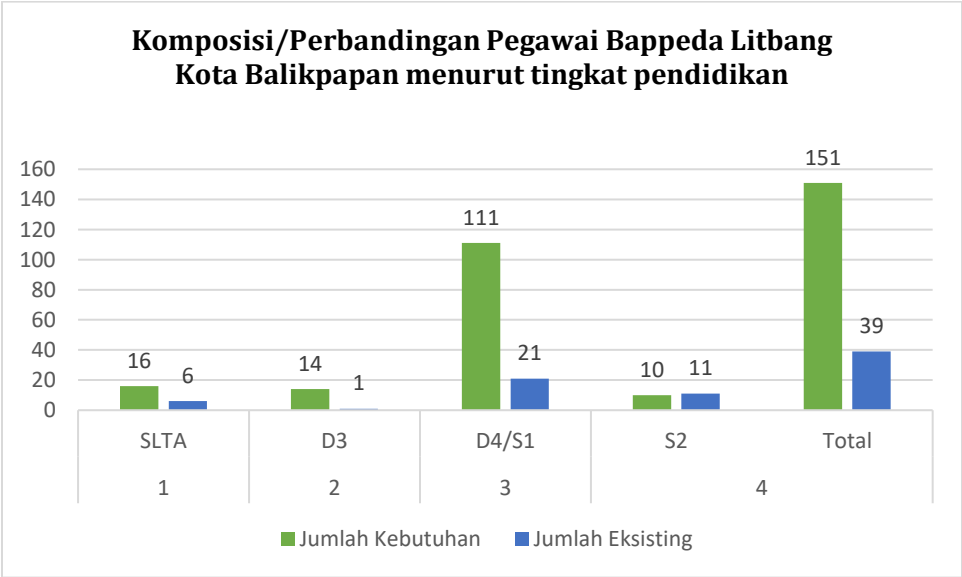
Perhitungan analisis jabatan (ANJAB) dan analisis beban kerja (ABK) Bappeda Litbang Kota Balikpapan di ketahui bahwa kebutuhan personil ASN berjumlah 151 orang. Namun untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kota Balikpapan saat ini hanya di dukung oleh 43 orang, sebagaimana rincian pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah pegawai di Bappeda Litbang Kota Balikpapan menurut Jabatan dan Jenis Kelamin**

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki – laki (L)	Perempuan (P)
1	Kepala Badan		1
2	Sekretaris	1	
3	Kepala Bidang Insfrastruktur Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1	
4	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	
5	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	
6	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	1	
7	Kepala Subbagian Umum	1	
8	Kepala Subbagian Keuangan		1
9	Perencana Ahli Muda	2	6
10	Perencana Ahli Pertama		2
11	Fasilitator Pemerintahan		1
12	Analisis Pemanfaatan Iptek		1
13	Peneliti Ahli Muda	1	1
14	Peneliti Ahli Pertama		1
15	Statistisi Ahli Pertama	1	
16	Analisis Data Ilmiah Muda	1	
17	Penelaah Teknis Kebijakan		5
18	Pengadministrasi Perkantoran	3	5
19	Penata Layanan Operasional	1	1
20	Staf Non PNS	1	2
Jumlah		16	27

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Litbang Kota Balikpapan

Adapun sumber daya manusia aparatur berdasarkan dari tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



**Gambar 2.2**  
**Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda Litbang Kota Balikpapan menurut tingkat pendidikan**  
Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Litbang Kota Balikpapan (SIMPEG)

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 8 Mei 2025 Nomor B/1941/M.SM.01.00/2025 Perihal Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional Dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, disampaikan rincian persetujuan kebutuhan jabatan fungsional perencana Kota Balikpapan. Untuk rincian perhitungan kebutuhan jabatan fungsional perencana pada Bappeda Litbang Kota Balikpapan yaitu 1 formasi untuk perencana ahli utama, 8 formasi untuk perencana ahli madya, 10 formasi untuk perencana ahli muda, dan 18 formasi untuk perencana ahli pertama. Sedangkan pemenuhan jabatan fungsional perencana saat ini hanya terdapat 8 orang perencana ahli muda dan 2 orang perencana pertama. Sehingga masih terdapat selisih yang cukup banyak untuk pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional perencana.

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang di miliki oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Prasarana dan Perlengkapan Bappeda Litbang Kota Balikpapan**

No	Nama Barang	Jumlah Unit	Keterangan
1	Sofa	6	Kondisi Baik
2	Lambang Garuda Pancasila	2	Kondisi Baik
3	Sepeda Motor	13	Kondisi Baik
4	Filing Cabinet Besi	9	Kondisi Baik

No	Nama Barang	Jumlah Unit	Keterangan
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Kondisi Baik
6	A.C. Window	31	Kondisi Baik
7	Papan Tulis	3	Kondisi Baik
8	Peralatan Jaringan lainnya	10	Kondisi Baik
9	Lemari Kayu	25	Kondisi Baik
10	Meja Rapat	28	Kondisi Baik
11	Meja Resepsionis	1	Kondisi Baik
12	Televisi	11	Kondisi Baik
13	Sound System	3	Kondisi Baik
14	Alat Rumah Tangga Lain-lain	73	Kondisi Baik
15	Printer (Peralatan Personal Komputer)	68	Kondisi Baik
16	Peralatan Personal Komputer lainnya	13	Kondisi Baik
17	Station Wagon	4	Kondisi Baik
18	Camera Video	10	Kondisi Baik
19	Alat Pemadam/Portable	4	Kondisi Baik
20	Layar Film/Projector	6	Kondisi Baik
21	P.C Unit	30	Kondisi Baik
22	Note Book	20	Kondisi Baik
23	Hard Disk	20	Kondisi Baik
24	External	19	Kondisi Baik
25	Handy Cam	3	Kondisi Baik
26	Mesin Absen (Time Recorder)	1	Kondisi Baik
27	Lemari Besi/Metal	3	Kondisi Baik
28	Lemari Kayu	25	Kondisi Baik
29	Meja Rapat	28	Kondisi Baik
30	Kursi Rapat	102	Kondisi Baik
31	Kursi Pegawai	70	Kondisi Baik
32	Meja Pegawai	50	Kondisi Baik
33	Alat Rumah Tangga Lain-lain	73	Kondisi Baik
34	Facsimile	1	Kondisi Baik
35	Lap Top	11	Kondisi Baik
36	Tablet PC	1	Kondisi Baik

Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB) Bappeda Litbang Kota Balikpapan

**2.1.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan**

Kinerja pelayanan Bappeda Kota Balikpapan selama 5 tahun terakhir (2020-2024) mengalami perubahan indikator kinerja utama. Perubahan

Indikator Kinerja Utama (IKU) tertuang dalam SK Kepala Bappeda Litbang Nomor 188.4.46/1359/BappedaLitbang tentang IKU perubahan Bappeda Litbang Kota Balikpapan, yang target tahunannya ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Perubahan tersebut dikarenakan adanya penyesuaian regulasi terbaru setelah ditetapkannya Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan periode 2021-2026. Berikut disajikan matrikulasi realisasi dan capaian kinerja dari IKU yang tertuang pada dokumen Renstra disertai dengan IKU perubahan yang telah ditetapkan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan**

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan capaian kinerja					56,22	56,24	56,25			51,51					91,62%		
	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja						42,36	43,82				42,76	42,87				100,94%	97,83%
2	Indeks inovasi daerah					60	62	63			57,88	39,41	57,21			89,80%	63,56%	90,81%
3	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah					32,5	33	34			34,25					105,38%		
	Nilai SAKIP Bappeda Litbang						83,08	72				68,43	75,98				82,36%	105,53%

Sumber : LAKIP Bappeda Litbang Kota Balikpapan

**\*Catatan:** kolom yang diblok menunjukkan bahwa indikator tidak digunakan pada tahun tersebut. Sedangkan realisasi pelaksanaan anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bappeda Litbang Kota Balikpapan**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dalam juta Rupiah)				Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam juta Rupiah)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		11.245.481.000	11.362.009.150	11.531.148.000		8.841.226.521	10.263.502.611	10.606.847.767		78,62%	90,33%	91,98%	1,26	9,72
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah		3.300.000.000	3.759.867.778	3.838.000.000		2.768.050.657	3.177.814.218	3.281.687.907		83,88%	84,52%	85,51%	8,01	9,27
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah		3.375.000.000	2.415.000.000	4.070.000.000		3.164.091.723	2.304.672.668	3.801.779.937		93,75%	95,43%	93,41%	20,04	18,90

Sumber : LAKIP Bappeda Litbang Kota Balikpapan

#### 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Bappeda Litbang

Kelompok sasaran layanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan adalah seluruh perangkat daerah Kota Balikpapan, instansi vertikal dan lembaga pemerintah lain seperti BPS, Kementerian/Lembaga Pusat, BUMN/BUMD, Masyarakat Akademisi/Peneliti, Sektor Swasta/Dunia Usaha, serta Organisasi Non Pemerintah/LSM.

### 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Bappeda Litbang Kota Balikpapan

#### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan

Permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.5**  
**Pemetaan Masalah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah  (Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) tahun 2024 adalah 84,50 dengan predikat baik)	Belum optimalnya capaian target kinerja pembangunan daerah	1. Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan yang akurat mutakhir dan terpadu belum memadai
			2. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah belum optimal
			3. Sinkronisasi sinergitas dan harmonisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal
2	Belum optimalnya pemanfaatan dokumen riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan  (Indeks inovasi daerah tahun 2024 adalah 57,21)	Belum optimalnya strategi dalam pemanfaatan hasil riset dan inovasi untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan	Pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan belum optimal

Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan, data diolah

### **2.2.2 Isu Strategis**

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan yang telah dipetakan di atas, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah melalui tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, responsif terhadap isu lingkungan hidup strategis, serta adaptif terhadap dinamika global, nasional, dan regional, maka dapat dirumuskan isu strategis Bappeda Litbang Kota Balikpapan sebagaimana terurai pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.6**  
**Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD**

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Sudah cukup baiknya nilai IPPD Kota Balikpapan 2. Konsistensi perencanaan vertikal daerah terhadap perangkat daerah	1. Keterbatasan data yang valid dan terintegrasi 2. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi untuk monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan 3. masih terdapat inkonsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran	Arah Kebijakan: Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif  Indikator TPB No 26: Indeks pelayanan publik	Perubahan Iklim dan Pemanasan Global	Pengelolaan sampah dan limbah plastik	Belum optimalnya tata kelola pemerintah daerah	Penguatan perencanaan berbasis data yang berorientasi pada dampak

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p>1. Terdapat beberapa Perguruan Tinggi yang aktive berperan dalam kelitbangan di Kota Balikpapan</p> <p>2. Potensi SDM Kalimantan Timur di Masa Mendatang</p>	<p>1. Belum optimalnya kontribusi kelitbangan dan inovasi terhadap perencanaan pembangunan</p> <p>2. Hasil-hasil riset dari pihak eksternal (akademisi, NGO, lembaga riset) belum terdokumentasi dengan baik dan belum dimanfaatkan secara sistematis dalam penyusunan kebijakan daerah</p> <p>3. Belum ada regulasi atau prosedur baku yang menjamin bahwa hasil riset dan inovasi menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan dan perencanaan</p> <p>4. Belum optimalnya kapabilitas dan kuantitas SDM peneliti</p> <p>5. Masih rendahnya perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual dan produk inovasi</p>	<p>Indikator TPB Nomor 9.5.1*: Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB</p>	<p>Inovasi kebijakan dan tata kelola global</p>	<p>Teknologi dan transformasi digital</p>	<p>Konektivitas wilayah</p>	<p>Peningkatan kolaborasi pemanfaatan dan pengelolaan serta kebijakan implementasi riset dan inovasi</p>

Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan, data diolah

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **3.1 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran Bappeda Litbang Kota Balikpapan tahun 2025-2029 ditentukan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya. Selain itu penentuannya juga didasarkan pada sasaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hal tersebut diatas, serta memperhatikan permasalahan yang terpetakan dan isu-isu strategis yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, maka dirumuskan pula tujuan dan sasaran Bappeda Litbang sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>											
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel  NSPK : 1. Perencanaan 2. Pengendalian 3. Evaluasi 4. Riset dan Inovasi	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, berkelanjutan dan inovatif		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)	84,50	84,80	85,10	85,40	85,70	86,00	86,30	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi kinerja	Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja (Nilai)	22,53	22,77	22,87	22,94	23,01	23,08	23,15	
			Nilai AKIP Komponen Pengukuran Kinerja (Nilai)	20,34	20,58	20,68	20,75	20,82	20,89	20,96	
		Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	57,21	58,01	58,86	59,72	60,6	61,52	62,45	
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	75,98	77,20	77,90	78,60	79,30	80,00	80,70	

Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan, data diolah

### 3.2 Strategi Perangkat Daerah

Agar pelaksanaan Renstra dapat berjalan secara terarah dan terukur, maka diperlukan penahapan yang sistematis dan terencana. Penahapan dalam konteks ini dimaksudkan sebagai pengelompokan atau pengurutan pelaksanaan strategi, program, kegiatan dan sub kegiatan kedalam tahapan tahunan yang logis dan realistis disesuaikan dengan kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta dinamika lingkungan strategis.

Pada Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan, penahapan ini terbagi menjadi lima tahap tahunan yang menggambarkan urutan prioritas dan fokus pembangunan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Setiap tahapan mencerminkan pendekatan bertingkat dalam penguatan kelembagaan, sistem perencanaan, riset, dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah.

Penahapan pembangunan ini tidak hanya berfungsi sebagai kerangka kerja pelaksanaan program, tetapi juga sebagai pengendali dan evaluasi terhadap capaian pembangunan daerah. Penekanan terhadap peningkatan kualitas perencanaan, peran riset dan inovasi, serta akuntabilitas kinerja lembaga menjadi landasan utama dalam merancang tahapan ini. Adapun penjabaran penahapan strategi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Penahapan Renstra Perangkat Daerah**

<b>Tahap I (2026)</b>	<b>Tahap II (2027)</b>	<b>Tahap III (2028)</b>	<b>Tahap IV (2029)</b>	<b>Tahap V (2030)</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Penguatan dasar-dasar sistem perencanaan daerah	Evaluasi dan penajaman perencanaan jangka menengah	Penguatan koordinasi lintas sektor dan wilayah	Pemantapan kualitas perencanaan untuk mendukung akuntabilitas kinerja	Pemantapan kualitas perencanaan untuk kesinambungan pembangunan
Penguatan kelembagaan dan agenda riset pembangunan	Peningkatan kualitas dan relevansi kajian litbang	Pemanfaatan hasil litbang dalam siklus perencanaan	Inovasi kebijakan dan teknologi untuk solusi pembangunan lokal	Penguatan sistem monitoring dampak litbang dan inovasi pembangunan

Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan, data diolah

### 3.3 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan pembangunan yang komprehensif dalam upaya mencapai tujuan dari Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan, yang harus relevan dan ada konsistensi dengan



perencanaan induk daerah yaitu RPJMD. Pernyataan sasaran RPJMD diterjemahkan dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan organisasi perangkat daerah.

Arah kebijakan Renstra Tahun 2025-2029 merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK, Arah kebijakan RPJMD dan rumusan arah kebijakan Renstra perangkat daerah. Adapun arah kebijakan Bappeda Litbang Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.3**  
**Arah Kebijakan Renstra Tahun 2025-2029**

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1. Perencanaan 2. Pengendalian 3. Evaluasi	Perencanaan dan penganggaran yang akuntabel	1. Meningkatkan peran forum satu data tingkat kota dan stakeholder data dalam pengintergrasian pemanfaatan data pembangunan 2. Mengintegrasikan rakordal pengendalian APBD dengan evaluasi kinerja perangkat daerah 3. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran berbasis data dan kinerja 4. Mengintegrasikan sistem perencanaan dan penganggaran daerah melalui SIPD 5. Memperkuat kapasitas SDM perencana dalam menyusun dokumen RKPD dan Renja berbasis evaluasi dan evidence-based planning 6. Mendorong sinkronisasi antara perencanaan tahunan dan dokumen penganggaran untuk memastikan efisiensi dan efektivitas belanja daerah	
2	Riset dan Inovasi	Perbaikan tata kelola kelembagaan dan birokrasi	1. Meningkatkan kualitas serta proses riset dan inovasi yang aplikatif 2. Meningkatkan peran jaringan penelitian dalam penyusunan dokumen perencanaan 3. Menyusun kebijakan yang mengatur proses perencanaan	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			berdasarkan rekomendasi hasil riset dan inovasi 4. Memperkuat knowledge transfer antar peneliti dan perguruan tinggi 5. Meningkatkan komitmen dan kesepahaman pelaku riset dan inovasi terkait dengan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual dan produk inovasi	

Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan, data diolah

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan difokuskan pada penguatan kualitas perencanaan berbasis data dan kinerja, serta peningkatan kapasitas SDM dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis. Selain itu, arah kebijakan juga diarahkan untuk membangun sistem inovasi daerah yang kolaboratif, dengan mengedepankan peran litbang dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih berbasis bukti. Ini menunjukkan adanya pergeseran pendekatan perencanaan yang lebih sistematis, terbuka, dan berorientasi pada hasil.

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Uraian Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan**

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dijelaskan pada bab di atas, selanjutnya ditetapkan program prioritas, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kota Balikpapan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Litbang Tahun 2025-2029. Berikut disajikan tabel terkait rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan pada periode tahun Renstra, yang selanjutnya harus dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Litbang Kota Balikpapan.

**Tabel 4.1**  
**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>							
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel  NSPK: 1. Perencanaan 2. Pengendalian 3. Evaluasi 4. Riset dan inovasi	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, berkelanjutan dan inovatif				Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)		
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi kinerja			Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja (Poin)		
					Nilai AKIP Komponen Pengukuran Kinerja (Poin)		
		Meningkatnya keselarasan antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan			Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
					Persentase keselarasan RKPD dengan renja perangkat daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan (%)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
					Persentase keselarasan RKPD dengan renja perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Dokumen perencanaan yang lebih berkualitas dan akurat	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Dokumen analisis data dan informasi pembangunan daerah yang menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Laporan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah			Indeks Inovasi Daerah (Angka)		
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan		Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
				Tersedianya rekomendasi kebijakan berbasis hasil kajian/ penelitian/ riset	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)	5.05.02.2.01.0004 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat (Laporan)	5.05.02.2.01.0006 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	
				Laporan Hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	5.05.02.2.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	5.05.02.2.02.0003 - Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	5.05.02.2.02.0006 - Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	5.05.02.2.02.0010 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Laporan hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	5.05.02.2.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	5.05.02.2.03.0009 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	
				Laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi		
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	5.05.02.2.04.0003 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	5.05.02.2.04.0005 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		
			Menguatnya Ekosistem Riset dan Inovasi		Persentase Tindak Lanjut Hasil Riset dan Inovasi (Rekomendasi Tindak Lanjut Dokumen RIPJPID) (%)	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH		
					Laporan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
						Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.2.01.0003 - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
					Laporan Kegiatan Inovensi dan Inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan inovensi dan inovasi (Pelatihan)	5.05.03.2.02 - Inovensi dan Inovasi	
						Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovensi dan Inovasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovensi dan Inovasi	
					Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovensi dan Inovasi	
					Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Sistem Informasi)	5.05.03.2.02 - Inovensi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	5.05.03.2.02.0001 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02.0002 - Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	
					Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Sistem Informasi)	5.05.03.2.02.0013 - Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	
					Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02.0016 - Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	
					Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi (Pelatihan)	5.05.03.2.02.0018 - Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Laporan realisasi anggaran perangkat daerah secara berkala dan akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Data dan dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tertib dan akuntabel	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Laporan pelaksanaan administrasi umum dan pengelolaan sarana perkantoran secara efektif dan efisien	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi  Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Barang milik daerah dalam kondisi baik dan fungsional melalui kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan, data diolah

**Tabel 4.2**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Bappeda Litbang Kota Balikpapan**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01 - PERENCANAAN				17.793.393.549		18.086.543.000		19.104.795.000		18.974.976.000		19.734.224.000		
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.291.603.000		14.479.699.000		15.219.795.000		15.051.116.000		15.693.258.000		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	83,08	85,95	14.291.603.000	86,25	14.479.699.000	86,55	15.219.795.000	86,85	15.051.116.000	87,15	15.693.258.000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.890.917.000		10.090.917.000		10.422.295.000		10.490.917.000		10.743.246.000		
Laporan realisasi anggaran perangkat daerah secara berkala dan akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	560	560	9.890.917.000	588	10.090.917.000	602	10.422.295.000	616	10.490.917.000	630	10.743.246.000		
5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.890.917.000		10.090.917.000		10.422.295.000		10.490.917.000		10.743.246.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	560	560	9.890.917.000	588	10.090.917.000	602	10.422.295.000	616	10.490.917.000	630	10.743.246.000		
5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				757.000.000		676.710.000		825.000.000		728.309.000		910.000.000		
Data dan dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tertib dan akuntabel	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	82	80	757.000.000	84	676.710.000	86	825.000.000	88	728.309.000	90	910.000.000		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	41	40		0		43		0		45			
5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				100.000.000		0		105.000.000		0		110.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	41	40	100.000.000	0	0	43	105.000.000	0	0	45	110.000.000		
5.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				657.000.000		676.710.000		720.000.000		728.309.000		800.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	82	80	657.000.000	84	676.710.000	86	720.000.000	88	728.309.000	90	800.000.000		
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.720.000.000		1.667.950.000		1.790.000.000		1.800.000.000		1.910.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Laporan pelaksanaan administrasi umum dan pengelolaan sarana perkantoran secara efektif dan efisien	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	1.720.000.000	3	1.667.950.000	3	1.790.000.000	3	1.800.000.000	3	1.910.000.000		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40	180		250		250		250		250			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.032	1.538		1.538		1.538		1.538		1.538			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	15		15		16		16		16			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				235.000.000		242.050.000		295.000.000		300.000.000		350.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	235.000.000	3	242.050.000	3	295.000.000	3	300.000.000	3	350.000.000		
5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				560.000.000		575.000.000		590.000.000		595.000.000		600.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	560.000.000	6	575.000.000	6	590.000.000	6	595.000.000	6	600.000.000		
5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	125.000.000	2	125.000.000	2	125.000.000	2	125.000.000	2	125.000.000		
5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.032	1.538	10.000.000	1.538	10.000.000	1.538	10.000.000	1.538	10.000.000	1.538	10.000.000		
5.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				30.000.000		30.900.000		35.000.000		35.000.000		40.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	15	30.000.000	15	30.900.000	16	35.000.000	16	35.000.000	16	40.000.000		
5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				600.000.000		600.000.000		650.000.000		650.000.000		700.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40	180	600.000.000	250	600.000.000	250	650.000.000	250	650.000.000	250	700.000.000		
5.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				150.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	150.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000		
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				591.186.000		608.922.000		740.000.000		655.352.000		675.012.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	591.186.000	0	608.922.000	2	740.000.000	0	655.352.000	0	675.012.000		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	8		6		6		6		6			
5.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				591.186.000		608.922.000		650.000.000		655.352.000		675.012.000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	8	591.186.000	6	608.922.000	6	650.000.000	6	655.352.000	6	675.012.000		
5.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		90.000.000		0		0		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	2	90.000.000	0	0	0	0		
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				497.500.000		507.500.000		522.500.000		527.500.000		550.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	497.500.000	1	507.500.000	1	522.500.000	1	527.500.000	1	550.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		37.500.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	37.500.000		
5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				450.000.000		460.000.000		475.000.000		480.000.000		500.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	450.000.000	1	460.000.000	1	475.000.000	1	480.000.000	1	500.000.000		
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				835.000.000		927.700.000		920.000.000		849.038.000		905.000.000		
Barang milik daerah dalam kondisi baik dan fungsional melalui kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi (Unit)	1	1	835.000.000	1	927.700.000	1	920.000.000	1	849.038.000	1	905.000.000		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	17		20		20		22		22			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	6		6		6		6		6			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	200	88		75		50		12		15			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	93	84		84		84		84		84			
5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				90.000.000		192.700.000		198.000.000		199.768.000		225.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	6	90.000.000	6	192.700.000	6	198.000.000	6	199.768.000	6	225.000.000		
5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				325.000.000		334.750.000		360.000.000		360.275.000		375.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	17	325.000.000	20	334.750.000	20	360.000.000	22	360.275.000	22	375.000.000		
5.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				175.000.000		150.000.000		100.000.000		25.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	200	88	175.000.000	75	150.000.000	50	100.000.000	12	25.000.000	15	30.000.000		
5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		75.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	93	84	70.000.000	84	70.000.000	84	70.000.000	84	70.000.000	84	75.000.000		
5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				175.000.000		180.250.000		192.000.000		193.995.000		200.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	175.000.000	1	180.250.000	1	192.000.000	1	193.995.000	1	200.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				3.501.790.549		3.606.844.000		3.885.000.000		3.923.860.000		4.040.966.000		
Meningkatnya keselarasan antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Persentase keselarasan RKPD dengan renja perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)	100	100	3.501.790.549	100	3.606.844.000	100	3.885.000.000	100	3.923.860.000	100	4.040.966.000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	Persentase keselarasan RKPD dengan renja perangkat daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	93,55	94,5		95		95,5		96		96,5			
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				1.670.490.549		1.720.605.000		1.880.000.000		1.893.795.000		1.950.000.000		
Dokumen perencanaan yang lebih berkualitas dan akurat	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapan (RPJPD/RPJMD/RK PD) (Dokumen)	0	2	1.670.490.549	3	1.720.605.000	2	1.880.000.000	3	1.893.795.000	2	1.950.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				1.670.490.549		1.720.605.000		1.880.000.000		1.893.795.000		1.950.000.000		
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RRJPD/RPJMD/RK PD) (Dokumen)	0	2	1.670.490.549	3	1.720.605.000	2	1.880.000.000	3	1.893.795.000	2	1.950.000.000		
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				931.300.000		959.239.000		1.020.000.000		1.032.381.000		1.063.352.000		
Dokumen analisis data dan informasi pembangunan daerah yang menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	1	1	931.300.000	1	959.239.000	1	1.020.000.000	1	1.032.381.000	1	1.063.352.000		
	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1	1		1		1		1		1			
5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				611.300.000		629.639.000		670.000.000		677.649.000		697.978.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	1	1	611.300.000	1	629.639.000	1	670.000.000	1	677.649.000	1	697.978.000		
5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				320.000.000		329.600.000		350.000.000		354.732.000		365.374.000		
Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1	1	320.000.000	1	329.600.000	1	350.000.000	1	354.732.000	1	365.374.000		
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				900.000.000		927.000.000		985.000.000		997.684.000		1.027.614.000		
Laporan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	3	3	900.000.000	3	927.000.000	3	985.000.000	3	997.684.000	4	1.027.614.000		
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				900.000.000		927.000.000		985.000.000		997.684.000		1.027.614.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	3	3	900.000.000	3	927.000.000	3	985.000.000	3	997.684.000	4	1.027.614.000		
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				2.960.000.000		3.289.452.000		3.340.000.000		4.030.939.000		3.961.868.000		
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				2.160.000.000		1.800.000.000		1.985.000.000		2.465.817.000		2.576.792.000		
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	0	55	2.160.000.000	60	1.800.000.000	65	1.985.000.000	70	2.465.817.000	75	2.576.792.000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				450.000.000		325.000.000		325.000.000		325.000.000		325.000.000		
Tersedianya rekomendasi kebijakan berbasis hasil kajian/penelitian/ riset	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)	3	2	450.000.000	1	325.000.000	2	325.000.000	1	325.000.000	3	325.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
5.05.02.2.01.0004 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				450.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)	3	2	450.000.000	1	200.000.000	2	200.000.000	1	200.000.000	3	200.000.000		
5.05.02.2.01.0006 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat				0		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat (Laporan)	0	0	0	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000		
5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				150.000.000		325.000.000		125.000.000		325.000.000		725.000.000		
Laporan Hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	0	0	150.000.000	1	325.000.000	0	125.000.000	1	325.000.000	0	725.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	1	0		0		0		0		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	1	0		0		0		0		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05.02.2.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial				0		200.000.000		0		200.000.000		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial (Dokumen)	0	0	0	1	200.000.000	0	0	1	200.000.000	0	0		
5.05.02.2.02.0003 - Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				0		0		0		0		300.000.000		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	300.000.000		
5.05.02.2.02.0006 - Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				0		0		0		0		300.000.000		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	300.000.000		
5.05.02.2.02.0010 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				150.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	0	1	150.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				1.180.000.000		750.000.000		1.100.000.000		1.350.000.000		1.100.000.000		
Laporan hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	1	1	1.180.000.000	0	750.000.000	0	1.100.000.000	1	1.350.000.000	0	1.100.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	3	2		2		2		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	1	0		1		1		1		1			
5.05.02.2.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				550.000.000		300.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	3	2	550.000.000	2	300.000.000	2	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000		
5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				230.000.000		0		0		250.000.000		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	1	1	230.000.000	0	0	0	0	1	250.000.000	0	0		
5.05.02.2.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				0		200.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	1	0	0	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000		
5.05.02.2.03.0009 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				400.000.000		250.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	1	1	400.000.000	1	250.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000		
5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi				380.000.000		400.000.000		435.000.000		465.817.000		426.792.000		
Laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	1	1	380.000.000	1	400.000.000	1	435.000.000	1	465.817.000	1	426.792.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.05.02.2.04.0003 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				330.000.000		300.000.000		360.000.000		365.817.000		376.792.000		
Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	1	1	330.000.000	1	300.000.000	1	360.000.000	1	365.817.000	1	376.792.000		
5.05.02.2.04.0005 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				50.000.000		100.000.000		75.000.000		100.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	1	1	50.000.000	1	100.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	50.000.000		
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				800.000.000		1.489.452.000		1.355.000.000		1.565.122.000		1.385.076.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Menguatnya Ekosistem Riset dan Inovasi	Persentase Tindak Lanjut Hasil Riset dan Inovasi (Rekomendasi Tindak Lanjut Dokumen RIPJPID) (%)	48	60	800.000.000	62,5	1.489.452.000	64,44	1.355.000.000	66	1.565.122.000	67,27	1.385.076.000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan				600.000.000		618.000.000		655.000.000		665.122.000		685.076.000		
Laporan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	1	600.000.000	1	618.000.000	1	655.000.000	1	665.122.000	1	685.076.000		
5.05.03.2.01.0003 - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				600.000.000		618.000.000		655.000.000		665.122.000		685.076.000		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	1	600.000.000	1	618.000.000	1	655.000.000	1	665.122.000	1	685.076.000		
5.05.03.2.02 - Inovensi dan Inovasi				200.000.000		871.452.000		700.000.000		900.000.000		700.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Laporan Kegiatan Invensi dan Inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi (Pelatihan)	0	0	200.000.000	1	871.452.000	1	700.000.000	1	900.000.000	1	700.000.000		
	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Sistem Informasi)	0	0		1		1		1		1			
	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	0	0		1		0		1		0			
5.05.03.2.02.0001 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah				200.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	0	1	200.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05.03.2.02.0002 - Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi				0		200.000.000		0		200.000.000		0		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	0	0	0	1	200.000.000	0	0	1	200.000.000	0	0		
5.05.03.2.02.0013 - Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Sistem Informasi)	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
5.05.03.2.02.0016 - Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi				0		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi (Laporan)	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
5.05.03.2.02.0018 - Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi				0		271.452.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi (Pelatihan)	0	0	0	1	271.452.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		

Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan, data diolah

#### 4.2 Program Pendukung Prioritas

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah, Bappeda Litbang melaksanakan berbagai program pendukung prioritas yang dirancang untuk memperkuat peran perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan. Program-program tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis, tetapi juga sebagai pengungkit dalam memastikan keselarasan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional maupun kebutuhan masyarakat.

Program pendukung prioritas yang dijalankan berorientasi pada peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, pengembangan inovasi daerah, serta fasilitasi riset dan kajian strategis yang relevan dengan isu-isu pembangunan terkini. Selain itu, program ini diarahkan untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pelaksanaan program prioritas Bappeda Litbang diturunkan ke dalam berbagai kegiatan dan subkegiatan yang memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Setiap kegiatan dirancang untuk mendukung pencapaian target yang terukur, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan efektivitas program prioritas yang dijalankan. Adapun kegiatan/subkegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.3**  
**Program Pendukung Prioritas**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				
1.	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya keselarasan antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
			5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
2.	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
			5.05.02.2.01.0004 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	
			5.05.02.2.01.0006 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	
			5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
			5.05.02.2.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	
			5.05.02.2.02.0003 - Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	
			5.05.02.2.02.0006 - Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	
			5.05.02.2.02.0010 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	
			5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
			5.05.02.2.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	
			5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
			5.05.02.2.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
			5.05.02.2.03.0009 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	
			5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
			5.05.02.2.04.0003 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
			5.05.02.2.04.0005 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	
3.	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Menguatnya Ekosistem Riset dan Inovasi	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
			5.05.03.2.01.0003 - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	
			5.05.03.2.02.0001 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	
			5.05.03.2.02.0002 - Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	
			5.05.03.2.02.0013 - Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	
			5.05.03.2.02.0016 - Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	
			5.05.03.2.02.0018 - Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	

Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan, data diolah

#### **4.3 Indikator Kinerja Utama**

Dalam melaksanakan kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan, telah ditetapkan rumusan tujuan dan sasaran yang akan di capai dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Dalam rumusan tujuan dan sasaran juga telah ditetapkan indikator kinerjanya sebagai tolak ukur keberhasilan. Indikator tersebut merupakan indikator kinerja utama Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan. Adapun indikator kinerja utama beserta target kinerja yang telah ditentukan dalam kurun waktu 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.4**  
**Indikator Kinerja Utama**

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
2.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	Merujuk IPPN Bappenas, IPPN mengukur kualitas perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) serta keselarasan perencanaan mereka dengan tujuan pembangunan nasional	Poin IPPD = Jumlah Indikator Komponen Sinergi + Jumlah Indikator Komponen Kualitas Perencanaan + Jumlah Indikator Komponen Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	84,50	84,80	85,10	85,40	85,70	86,00	86,30	
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan seberapa baik perangkat daerah tersebut dalam merencanakan melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya	Diperoleh dari evaluasi internal yang dilakukan oleh inspektorat daerah (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Nilai Evaluasi AKIP = Nilai komponen perencanaan kinerja+ Nilai komponen pengukuran kinerja+ Nilai komponen pelaporan kinerja+ nilai evaluasi akuntabilitas	75,98	77,20	77,90	78,60	79,30	80,00	80,70	

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.	Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	Indikator yang menggambarkan ketercapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil kinerja daerah (LHE KemenPAN-RB) dengan fokus terhadap Komponen Perencanaan.	Nilai AKIP komponen perencanaan memiliki bobot 30% dari total nilai AKIP keseluruhan yang diperoleh dari LHE KemenpanRB pada tahun berjalan	22,53	22,77	22,87	22,94	23,01	23,08	23,15	
5.	Nilai AKIP Komponen Pengukuran Kinerja	Nilai	Indikator yang menggambarkan ketercapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil kinerja daerah (LHE KemenPAN-RB) dengan fokus terhadap Komponen Pengukuran Kinerja	Nilai AKIP komponen pengukuran memiliki bobot 30% dari total nilai AKIP keseluruhan yang diperoleh dari LHE KemenpanRB pada tahun berjalan	20,34	20,58	20,68	20,75	20,82	20,89	20,96	
6.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Indeks Inovasi Daerah adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kemampuan dan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengembangkan, menerapkan, serta mendiseminasikan inovasi di bidang tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan bentuk inovasi daerah lainnya	<div><b>METODE PENILAIAN</b>  Skor Total = ISP + rata-rata ISI <math display="block">ISP = \sum_{i=1}^{14} \text{Skor Indikator Satuan Pemda ke } i</math><math display="block">\text{Rata - rata ISI} = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \text{Skor Indikator Satuan Inovasi ke } i \text{ Inovasi ke } j}{n}</math><math display="block">\text{Skor Jumlah Inovasi} = \text{Jumlah Inovasi} \times 0,2</math><math display="block">IID = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100</math> <small>n adalah Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah i adalah nomor indikator j adalah nomor inovasi ISP adalah Indikator Satuan Pemda ISI adalah Indikator Satuan Inovasi</small></div>	57,21	58,01	58,86	59,72	60,60	61,52	62,45	

Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan, data diolah



#### **4.4 Indikator Kinerja Kunci**

Selain indikator kinerja utama, terdapat pula Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang di ampu Bappaeda Litbang Kota Balikpapan. IKK yang dimaksud disini adalah indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). IKK ini merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mendukung capaian kinerja organisasi. Berikut disajikan daftar IKK Bappeda Litbang Kota Balikpapan sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Kunci**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)			(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	5.01 - PERENCANAAN												
2.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	positif	Indeks	Merujuk IPPN Bappenas, IPPN mengukur kualitas perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) serta keselarasan perencanaan mereka dengan tujuan pembangunan nasional	Poin IPPD = Jumlah Indikator Komponen Sinergi + Jumlah Indikator Komponen Kualitas Perencanaan + Jumlah Indikator Komponen Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	84,50	84,80	85,10	85,40	85,70	86,00	86,30	
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	positif	Nilai	Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan seberapa baik perangkat daerah tersebut dalam merencanakan melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya	Diperoleh dari evaluasi internal yang dilakukan oleh inspektorat daerah (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Nilai Evaluasi AKIP = Nilai komponen perencanaan kinerja+ Nilai komponen pengukuran kinerja+ Nilai komponen pelaporan kinerja+ nilai evaluasi akuntabilitas	75,98	77,20	77,90	78,60	79,30	80,00	80,70	
4.	Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	positif	Poin	Indikator yang menggambarkan ketercapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil kinerja daerah (LHE KemenPAN-RB) dengan fokus terhadap komponen perencanaan.	Nilai AKIP komponen perencanaan memiliki bobot 30% dari total nilai AKIP keseluruhan yang diperoleh dari LHE KemenpanRB pada tahun berjalan	22,53	22,77	22,87	22,94	23,01	23,08	23,15	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)			(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.	Nilai AKIP Komponen Pengukuran Kinerja	positif	Poin	Indikator yang menggambarkan ketercapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil kinerja daerah (LHE KemenPAN-RB) dengan fokus terhadap Komponen Pengukuran Kinerja	Nilai AKIP komponen pengukuran memiliki bobot 30% dari total nilai AKIP keseluruhan yang diperoleh dari LHE KemenpanRB pada tahun berjalan	20,34	20,58	20,68	20,75	20,82	20,89	20,96	
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	positif	Nilai	Ukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan pegawai/ASN/staf di dalam suatu perangkat daerah terhadap pelayanan manajerial, administratif, maupun pendukung yang diberikan oleh unit kerja atau bagian internal perangkat daerah tersebut.	<p>Nilai IKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 12 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:</p> <div><math display="block">\begin{aligned} \text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} &amp;= \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} \\ &amp;= \frac{1}{12} \\ &amp;= 0,083 \end{aligned}</math></div> <p>Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:</p> <div><math display="block">\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}}</math></div>	83,08	85,65	85,95	86,25	86,55	86,85	87,15	
7.	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	positif	%	Persentase jumlah program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibandingkan dengan total program dalam RPJMD, dinyatakan dalam persen (%)	<div><math display="block">\text{Persentase Program dalam RKPD terhadap RPJMD} = \left( \frac{\text{Jumlah Program dalam RKPD}}{\text{Jumlah Program dalam RPJMD}} \right) \times 100</math><p>Keterangan:</p><ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah Program dalam RKPD = Jumlah program yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun tertentu.</li><li>• Jumlah Program dalam RPJMD = Jumlah program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku.</li></ul></div>	93,55	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00	96,50	



NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)			(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
8.	Persentase keselarasan RKPD dengan renja perangkat daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan	positif	%	Mengukur tingkat keselarasan antara program yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan program dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	$\text{Persentase Keselarasan} = \frac{\text{Jumlah Program Renja yang Selaras dengan RKPD (Bidang Terkait)}}{\text{Total Jumlah Program RKPD (Bidang Terkait)}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembilang = program dalam Renja PD yang sesuai/mendukung program RKPD pada bidang terkait.</li> <li>- Penyebut = total program yang tercantum dalam RKPD bidang terkait (perekonomian, SDA, infrastruktur, kewilayahan).</li> </ul>	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Persentase keselarasan RKPD dengan renja perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	positif	%	Mengukur tingkat keselarasan antara program yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan program dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	$\text{Persentase Keselarasan} = \frac{\text{Jumlah Program Renja yang Selaras dengan RKPD (Bidang Terkait)}}{\text{Total Jumlah Program RKPD (Bidang Terkait)}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembilang = program dalam Renja PD yang sesuai/mendukung program RKPD pada bidang terkait.</li> <li>- Penyebut = total program yang tercantum dalam RKPD bidang terkait (Pemerintahan dan Pembangunan Manusia).</li> </ul>	100	100	100	100	100	100	100	
10.	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	positif	Persentase	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja adalah rata rata laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja dalam periode waktu tertentu	$LP\ PDB_{ptk} = \left( \frac{PDB_{ptk_t} - PDB_{ptk_{t-1}}}{PDB_{ptk_{t-1}}} \right) \times 100\%$ <p>dengan:</p> $PDB_{ptk} = \frac{PDB}{PB}$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LP PDB<sub>ptk</sub> : Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)</li> <li>PDB<sub>ptk<sub>t</sub></sub> : PDB per tenaga kerja pada periode t (ribu rupiah)</li> <li>PDB<sub>ptk<sub>t-1</sub></sub> : PDB per tenaga kerja pada periode t-1 (ribu rupiah)</li> <li>PDB : Produk domestik bruto harga konstan (ribu rupiah)</li> <li>PB : Jumlah penduduk yang bekerja (orang)</li> </ul>	1,32	3,50	4,25	5,00	5,75	6,50	7,25	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)			(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
11.	Laju pertumbuhan PDB per kapita	positif	(%)	PDB per kapita menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nilai produk domestik bruto (PDB) dan jumlah penduduk. PDB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDB atas harga dasar konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia. Laju pertumbuhan PDB per kapita merupakan pertumbuhan PDB per kapita pada periode tertentu	Rumus: $LP\ PDBpk = \left( \frac{PDBpk_t - PDBpk_{t-1}}{PDBpk_{t-1}} \right) \times 100\%$ Keterangan: LP PDBpk : Laju pertumbuhan PDB (%) PDBpk : PDB per kapita (ribu rupiah) PDBpk <sub>t</sub> : PDB per kapita pada periode ke-t (ribu rupiah) PDBpk <sub>t-1</sub> : PDB per kapita pada periode ke-(t-1) (ribu rupiah)	6,18	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	
12.	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	positif	Dokumen	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan risiko di antara para pihak (Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur). Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/ atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi. Berdasarkan Perpres 38/2015 dan Permen PPN/Kepala Bappenas no. 4/2015, terdapat tiga tahap pelaksanaan KPBU: 1. Proyek dalam Perencanaan KPBU: a. Identifikasi dan penetapan b. Penganggaran dan c.	Rumus: $JPKPBU = JPK + JPM + JPL$ Keterangan : JPKPBU : Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) JPK : Jumlah Proyek yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama JPM : Jumlah Proyek yang sudah ditetapkan pemenang JPL : Jumlah Proyek yang sedang dalam proses pelelangan	3	3	3	3	4	4	5	

[illegible]

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)			(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
13.	Jumlah Alokasi Pemerintah Menyiapkan Proyek, Transaksi Proyek, dan Dukungan Pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)		Rp	Jumlah anggaran yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang dialokasikan setiap tahunnya	Jumlah anggaran yang tersedia pada perangkat daerah yang terkait dengan proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang dialokasikan setiap tahunnya	3.187.610.230	3.200.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.700.000.000	3.700.000.000	3.700.000.000	
14.	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
15.	Indeks Inovasi Daerah	positif	Angka	Indeks Inovasi Daerah adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kemampuan dan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengembangkan, menerapkan, serta mendiseminasikan inovasi di bidang tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan bentuk inovasi daerah lainnya	<div><b>METODE PENILAIAN</b> <math>Skor\ Total = ISP + rata-rata\ ISI</math> <math>ISP = \sum_{i=1}^n Skor\ Indikator\ Satuan\ Pemda\ ke - i</math> <math>Rata - rata\ ISI = \frac{ISI_1 + ISI_2 + \dots + ISI_n}{n}</math> <math>Skor\ Jumlah\ Inovasi = Jumlah\ Inovasi \times 0,2</math> <math>ISI = \frac{Skor\ Total}{Skor\ Total\ Maksimum} \times 100</math> <small>n adalah Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah i adalah nomor indikator j adalah nomor Inovasi ISI* adalah Indikator Satuan Pemda ISI adalah Indikator Satuan Inovasi</small></div>	57,21	58,01	58,86	59,72	60,60	61,52	62,45	
16.	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	positif	Persentase	Rekomendasi yang dihasilkan berbasis kajian untuk mendukung proses perumusan dan implementasi pembangunan daerah	<div><math>Persentase = \left( \frac{Jumlah\ Rekomendasi\ Kebijakan\ yang\ Diimplementasikan}{Total\ Rekomendasi\ Kebijakan\ yang\ Ditetapkan} \right) \times 100\%</math></div>	0	50	55	60	65	70	75	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)			(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
17.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Riset dan Inovasi (Rekomendasi Tindak Lanjut Dokumen RIPJPID)	positif	%	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan rekomendasi hasil riset dan inovasi yang tercantum dalam Dokumen Rencana Induk Pembangunan Jangka Panjang Ilmu Pengetahuan dan Inovasi Daerah (RIPJPID) telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah, lembaga, atau pemangku kepentingan terkait	<div>Rumus Persentase Tindak Lanjut Hasil Riset dan Inovasi: <math display="block">\text{Persentase Tindak Lanjut} = \left( \frac{\text{Jumlah Hasil Riset/Inovasi yang Ditindaklanjuti}}{\text{Total Hasil Riset/Inovasi}} \right) \times 100\%</math></div>	48	54,84	60,00	62,50	64,44	66,00	67,27	
18.	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	positif	(%)	Riset terbagi menjadi dua kegiatan yaitu : Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dan penarikan kesimpulan ilmiah. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan yang telah terbukti kebenarannya dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu periode (setahun). Perhitungan indikator ini menggunakan PDB Atas Dasar Harga Berlaku.	<div>Rumus: <math display="block">\text{Proporsi ARP terhadap PDB} = \frac{(A + B + C + D)}{PDB} \times 100\%</math></div>	0,00265	0,0032 2	0,0037 8	0,0043 5	0,0049 1	0,0054 8	0,0060 4	

Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan, data diolah

## BAB V PENUTUP

Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini mencerminkan komitmen dalam memperkuat peran Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Pelaksanaan Renstra ini akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan kebijakan, dinamika pembangunan, serta kebutuhan organisasi. Evaluasi tersebut juga akan menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian strategi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Dengan ditetapkannya Renstra Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam menyusun rencana kerja tahunan serta menjadi dokumen yang dapat memfasilitasi dan dapat mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis dilingkungan Bappeda Litbang Kota Balikpapan sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, perangkat daerah lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kota Balikpapan.

**ANALISA PERMASALAHAN BAPPEDA LITBANG**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Permasalahan PD	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Belum optimalnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah  (Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) tahun 2024 adalah 84,50 dengan predikat baik)	Belum optimalnya capaian target kinerja pembangunan daerah	1. Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan yang akurat mutakhir dan terpadu belum memadai	1. Keterbatasan data yang valid dan terintegrasi	Penguatan perencanaan berbasis data yang berorientasi pada dampak	1. Penguatan analisis data pembangunan dalam rangka mengidentifikasi permasalahan kota	1. Meningkatkan peran forum satu data tingkat kota dan stakeholder data dalam pengintegrasian pemanfaatan data pembangunan
			2. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah belum optimal	2. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi untuk monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan		2. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi untuk monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan	2. Mengintegrasikan rakordal pengendalian APBD dengan evaluasi kinerja perangkat daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Permasalahan PD	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3. Sinkronisasi sinergitas dan harmonisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal	3. masih terdapat inkonsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran		1. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder dalam pengendalian proses pembangunan 2. Pengendalian atas pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah 3. Pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran yang berbasiskan prinsip “Money Follow Program”	1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran berbasis data dan kinerja 2. Mengintegrasikan sistem perencanaan dan penganggaran daerah melalui SIPD 3. Memperkuat kapasitas SDM perencana dalam menyusun dokumen RKPD dan Renja berbasis evaluasi dan evidence-based planning 4. Mendorong sinkronisasi antara perencanaan tahunan dan dokumen penganggaran untuk memastikan efisiensi dan efektivitas belanja daerah
2	Belum optimalnya pemanfaatan dokumen riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan  (Indeks inovasi daerah	Belum optimalnya strategi dalam pemanfaatan hasil riset dan inovasi untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan	Pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan belum optimal	1. Belum optimalnya kontribusi kelitbangan dan inovasi terhadap perencanaan pembangunan	Peningkatan kolaborasi pemanfaatan dan pengelolaan serta kebijakan implementasi riset dan inovasi	1. Optimalisasi implementasi hasil riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	1. Meningkatkan kualitas serta proses riset dan inovasi yang aplikatif



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Permasalahan PD	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	tahun 2024 adalah 57,21)			2. Hasil-hasil riset dari pihak eksternal (akademisi, NGO, lembaga riset) belum terdokumentasi dengan baik dan belum dimanfaatkan secara sistematis dalam penyusunan kebijakan daerah		2. Peningkatan komitmen serta keterpaduan perencanaan riset dan inovasi antar pemangku kepentingan	2. Meningkatkan peran jaringan penelitian dalam penyusunan dokumen perencanaan
				3. Belum ada regulasi atau prosedur baku yang menjamin bahwa hasil riset dan inovasi menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan dan perencanaan		3. Penyusunan regulasi riset dan inovasi	3. Menyusun kebijakan yang mengatur proses perencanaan berdasarkan rekomendasi hasil riset dan inovasi
				4. Belum optimalnya kapabilitas dan kuantitas SDM peneliti		4. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM peneliti	4. Memperkuat knowledge transfer antar peneliti dan perguruan tinggi
				5. Masih rendahnya perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual dan produk inovasi		5. Penguatan sinkronisasi, koordinasi, kemitraan dan kerjasama riset dan inovasi	5. Meningkatkan komitmen dan kesepahaman pelaku riset dan inovasi terkait dengan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual dan produk inovasi

## X. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta mengacu pada Peraturan WaliKota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan beberapa landasan hukum lainnya yang akan disebutkan dalam sub bab landasan hukum. Renstra BKAD Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029 adalah rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 2025 s.d 2029 serta memuat langkah dan proses pencapaian hasil yaitu Permasalahan dan Isu Strategis BKAD Kota Balikpapan, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program, Kegiatan, dan Pendanaan BKAD Kota Balikpapan, serta Penentuan Target Tujuan dan Sasaran yang akan ditentukan dengan Indikator Tujuan dan Sasaran yang disusun sesuai tugas, wewenang dan fungsi BKAD Kota Balikpapan.

Renstra BKAD Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah berfungsi sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja, pelaporan kinerja, pengendalian kinerja, dan evaluasi kinerja BKAD Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta sebagai pedoman dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2025 – 2029. Selain itu, Renstra BKAD Kota Balikpapan 2025 – 2029 berfungsi sebagai dokumen rujukan yang menggambarkan kondisi keuangan dan aset kota Balikpapan serta sebagai rujukan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan dokumen rencana, pelaporan, pengendalian, dan evaluasi kinerja lainnya.

Renstra merupakan dokumen yang disusun berdasarkan tahapan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses penyusunan Rancangan Awal Renstra BKAD Kota Balikpapan dilakukan dalam beberapa tahapan dimulai dengan Persiapan Penyusunan Renstra dengan pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, melakukan orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah yang mencakup peraturan perundang-undangan, panduan atau pedoman teknis penyusunan Renstra SKPD dan penyusunan anggaran, menyusun agenda kerja tim penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. Tahapan selanjutnya adalah menyusun rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, dan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan.

Dokumen rujukan awal dalam menyusun Renstra BKAD adalah dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029 yang memuat tujuan, sasaran,

indikator kinerja dan target yang harus dicapai oleh Kota Balikpapan dalam kurun waktu tersebut untuk meningkatkan kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi BKAD Kota Balikpapan.

Keterkaitan Renstra BKAD Kota Balikpapan dengan dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029:

- a. Mempelajari RPJMD Kota Balikpapan yang memuat Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan;
- b. Perumusan sasaran, strategi dan kebijakan jangka menengah BKAD Kota Balikpapan guna mencapai target kinerja RPJMD Kota Balikpapan yang menjadi kewenangan BKAD Kota Balikpapan;
- c. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun berdasarkan RPJMD Kota Balikpapan;
- d. Perumusan indikator kinerja BKAD Kota Balikpapan yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029; dan;
- e. Hasil evaluasi terhadap Renstra BKAD Kota Balikpapan periode sebelumnya merupakan informasi utama bagi penyusunan Renstra BKAD Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah BKAD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- q. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan daerah
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah;
- w. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- x. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Balikpapan;
- y. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- z. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- aa. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 adalah sebagai upaya atau langkah ke depan untuk:

- a. Memberi arah, pedoman dan landasan dalam menyusun Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan sebagai Perencana Kegiatan Tahunan.
- b. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
- c. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
- d. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan.
- e. Sebagai pedoman dalam pengukuran capaian kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BKAD Kota Balikpapan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029 merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, kebijakan dan Program yang disusun sesuai dengan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah dan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif untuk dijadikan pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan guna mendukung tercapainya tujuan dari Visi dan Misi Kepala Daerah periode Tahun 2025 – 2029.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renstra BKAD Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029 terdiri dari 5 (Lima) bab secara garis besar disusun dengan sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Dokumen Renstra BKAD Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029.

#### **BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Memuat uraian terkait gambaran pelayanan BKAD Kota Balikpapan yang berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi misi dan program Walikota dan Wakil Wali Kota terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah, dan penentuan isu-isu strategis BKAD Kota Balikpapan.

#### **BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah serta Cascading kinerja BKAD, strategi dan arah kebijakan jangka menengah perangkat daerah Kota Balikpapan.

#### **BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Berisi rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD serta pendanaan jangka menengah rentang waktu tahun 2025 – 2029 BKAD Kota Balikpapan.

#### **BAB V Penutup**

Berisi ringkasan dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra BKAD Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029.

# **BAB I**

## **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur organisasi**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 1 (satu) Kepala UPTD 2 (dua) Kepala Sub Bagian, 8 (delapan) Kepala Sub Bidang dan berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional terjadi beberapa penyetaraan pada jabatan administrasi ke jabatan fungsional sehingga terdapat 3 (tiga) jabatan yang disetarakan yakni 2 (dua) Kasubbag dan 1 (empat) Kasubbid menjadi Jabatan Fungsional.

Dalam rangka Penyusunan Uraian Tugas Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Keuangan maka BKAD Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah, dan dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, BKAD Kota Balikpapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rancangan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengelola keuangan dan Barang Milik Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah;
- c. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah;
- e. penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi bagi semua Perangkat Daerah dan masyarakat dalam lingkup urusan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah;
- f. pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelola keuangan dan Barang Milik Daerah;
- g. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLUD;
- h. pengoordinasian dan rekonsiliasi pendapatan Daerah;
- i. pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah;
- j. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan**

Kepala BKAD Kota Balikpapan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dengan uraian sebagai berikut :

- 1) menyelenggarakan tugas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah;
- 2) mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **1.1.2 Tugas dan Fungsi Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protocol, hubungan masyarakat, layanan informasi dan pengaduan, pembinaan pelayanan public, kearsipan, surat menyurat dan evaluasi dan pelaporan. Sekretaris selain melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :

- 1) pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- 2) pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- 3) pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- 4) pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- 5) pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, layanan informasi dan pengaduan;
- 6) pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- 7) pengelolaan anggaran Badan;
- 8) pelaksanaan administrasi keuangan;
- 9) pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- 10) pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- 11) pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- 12) pengelolaan pengaduan masyarakat;
- 13) pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- 14) pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi;
- 15) pengoordinasian pengelolaan belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;
- 16) pengoordinasian bidang dan UPTD;
- 17) pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- 18) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat terdiri atas:

### **1.1.3 Tugas Sub Bagian Umum**

- 1) melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- 2) mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- 3) melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana dan prasarana kantor;
- 4) menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- 5) melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- 6) melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan aset Daerah;
- 7) melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- 8) melaksanakan pengamanan hardware, software dan data elektronik yang digunakan oleh Badan;
- 9) menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- 10) menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- 11) menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- 12) menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- 13) mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis bidang keuangan dan aset Daerah dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- 14) melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- 15) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **1.1.4 Tugas Substansi Program**

- 1) melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja tahunan, penetapan kinerja, dan laporan kinerja.
- 2) melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- 3) melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan
- 4) melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Badan;
- 5) mengkoordinasikan pembangunan, pengembangan pemeliharaan aplikasi dengan bidang;
- 6) melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- 7) mengelola informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

- 8) memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
- 9) menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- 10) melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan serta informasi layanan dan pengaduan;
- 11) memfasilitasi pembinaan tata kelola Pelayanan Publik;
- 12) melaksanakan pengelolaan belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja subsidi, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;
- 13) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- 14) melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan
- 15) pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- 16) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **1.1.5 Tugas Substansi Keuangan**

- 1) menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- 2) menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- 3) mengkoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran/ dokumen pelaksanaan anggaran;
- 4) melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- 5) mengelola penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Kontribusi dari hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- 6) melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
- 7) menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- 8) mengkoordinir dan meneliti anggaran;
- 9) menyusun laporan keuangan;
- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- 11) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **1.1.6 Tugas dan Fungsi Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan**

Bidang Anggaran mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Anggaran. Kepala Bidang Anggaran selain melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program dan kegiatan Bidang Anggaran;
- 2) pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah;

- 3) penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan dan administrasi APBD;
- 4) perumusan bahan kebijakan dan pembinaan teknis penyusunan APBD;
- 5) penyusunan konsep Nota Keuangan, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD;
- 6) penyusunan dan pengoordinasian analisa standar biaya, standarisasi biaya umum dan jasa dan harga satuan pokok kegiatan;
- 7) pelaksanaan penelitian dan analisa bahan serta data pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
- 8) pelaksanaan pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah;
- 9) pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- 10) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Anggaran terdiri atas:

#### **1.1.7 Subbidang Penyusunan Anggaran**

- 1) menyusun program dan kegiatan Subbidang Perencanaan Anggaran;
- 2) menghimpun dan mengolah bahan serta data pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
- 3) melaksanakan verifikasi dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- 4) menyiapkan bahan laporan untuk perencanaan, pendapatan, belanja dan pembiayaan secara periodik;
- 5) melaksanakan koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS;
- 6) melaksanakan koordinasi dan penyusunan KUPA dan perubahan PPAS;
- 7) melaksanakan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan daerah;
- 8) melaksanakan koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah;
- 9) melaksanakan koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan daerah;
- 10) menyiapkan bahan penyusunan pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah;
- 11) melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- 12) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **1.1.8 Subbidang Kebijakan Administrasi Keuangan**

- 1) menyusun program dan kegiatan Sub Koordinator Pengendalian Anggaran;
- 2) menyusun bahan konsep kebijakan pengendalian anggaran;
- 3) melaksanakan koordinasi, penyusunan dan verifikasi/asistensi RKA-SKPD;

- 4) melaksanakan koordinasi, penyusunan dan verifikasi/asistensi DPA-SKPD;
- 5) melaksanakan koordinasi, penyusunan dan verifikasi/asistensi DPPA-SKPD
- 6) melaksanakan inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah;
- 7) melaksanakan implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah;
- 8) melaksanakan pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota;
- 9) melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- 10) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **1.1.9 Substansi Pendapatan**

- 1) menyusun program dan kegiatan di bidang kebijakan anggaran;
- 2) menyiapkan bahan kebijakan, pengelolaan, dan pembinaan teknis keuangan Daerah;
- 3) menyiapkan bahan pelaksanaan petunjuk teknis penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah;
- 4) melaksanakan koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD;
- 5) melaksanakan koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- 6) melaksanakan koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran;
- 7) melaksanakan pembinaan perencanaan penganggaran Daerah Pemerintah Daerah;
- 8) melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- 9) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **1.1.10 Tugas dan Fungsi Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan**

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang perbendaharaan. Bidang Perbendaharaan membawahkan Subbidang dan Sub koordinator. Subbidang dan sub koordinator dipimpin oleh Kepala Subbidang dan pejabat fungsional AKD sub koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program dan kegiatan Bidang Perbendaharaan;
- 2) perumusan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang perbendaharaan;
- 3) pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan di bidang perbendaharaan;

- 4) perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis surat perintah membayar dan penerbitan surat perintah pencairan dana;
- 5) pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah;
- 6) pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan Daerah;
- 7) penyiapan rancangan peraturan Daerah mengenai investasi Daerah, pembentukan dana cadangan, pinjaman Daerah/hutang, penyertaan modal, surat berharga Daerah, dan pinjaman Daerah;
- 8) pelaksanaan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Perangkat Daerah;
- 9) pelaksanaan penerbitan surat penyediaan dana sebagai pengendali pelaksanaan APBD;
- 10) pengoordinasian fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- 11) pengoordinasian dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas Daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan atau pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- 12) pelaksanaan penatausahaan pembiayaan Daerah;
- 13) pelaksanaan pembinaan penatausahaan keuangan Daerah;
- 14) pelaksanaan pengelolaan dana cadangan, dana darurat dan mendesak, serta dana bagi hasil;
- 15) pelaksanaan analisa investasi penerimaan pinjaman, pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman, pemberian pinjaman Daerah, penerimaan kembali pinjaman Daerah;
- 16) pelaksanaan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan;
- 17) penyusunan kebijakan dan alokasi subsidi;
- 18) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- 19) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Perbendaharaan terdiri atas:

#### **1.1.11 Subbidang Belanja Tidak Langsung**

- 1) menyusun program dan kegiatan di bidang kebijakan perbendaharaan;
- 2) menyiapkan bahan kebijakan kegiatan Subbidang Belanja Tidak Langsung;
- 3) melaksanakan analisis penempatan uang Daerah melalui investasi Daerah dalam rangka penerimaan Daerah;
- 4) menyiapkan bahan rancangan peraturan Daerah mengenai investasi Daerah, pembentukan dana cadangan, pinjaman Daerah/hutang, penyertaan modal, surat berharga Daerah, dan pinjaman Daerah;

- 5) menyiapkan dan melaksanakan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan surat penyediaan dana;
- 6) menyusun petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban;
- 7) melaksanakan analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman Pemerintah Daerah;
- 8) melaksanakan analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman Pemerintah Daerah;
- 9) melaksanakan analisis perencanaan dan pelaksanaan pemberian pinjaman Daerah;
- 10) melaksanakan analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan kembali pinjaman Daerah;
- 11) menyusun kebijakan dan alokasi subsidi; 1. melaksanakan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan;
- 12) menyiapkan bahan penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran;
- 13) menyiapkan bahan pembinaan penatausahaan dalam sistem informasi Pemerintah Daerah;
- 14) melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- 15) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya

#### **1.1.12 Subbidang Belanja Langsung**

- 1) menyusun program dan kegiatan di bidang belanja Daerah;
- 2) melaksanakan penelitian kelengkapan dokumen pengajuan surat perintah membayar belanja Perangkat Daerah;
- 3) melaksanakan penerbitan surat perintah pencairan dana;
- 4) mengeluarkan surat penolakan penerbitan surat perintah pencairan dana;
- 5) melaksanakan penyetoran potongan gaji aparatur sipil negara kepada pihak ketiga;
- 6) melakukan rekonsiliasi gaji;
- 7) melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintah Daerah;
- 8) melaksanakan pengelolaan dana cadangan Pemerintah Daerah;
- 9) melaksanakan pengelolaan dana darurat dan mendesak;
- 10) menyiapkan bahan data laporan keuangan periodik kepada instansi terkait sesuai ketentuan;
- 11) melaksanakan pengelolaan dana bagi hasil Daerah;
- 12) melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- 13) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **1.1.13 Substansi Kas Daerah**

- 1) menyusun program dan kegiatan Substansi Kas Daerah;
- 2) melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- 3) memverifikasi surat perintah pencairan dana; d. mencatat penerimaan dan pengeluaran ke dalam buku kas umum bendahara umum Daerah;
- 4) mempersiapkan pembukaan rekening kas umum Daerah pada bank umum Pemerintah Daerah;
- 5) mempersiapkan pembukaan rekening penerimaan dan rekening pengeluaran Perangkat Daerah pada bank umum Pemerintah Daerah;
- 6) melaksanakan pengelolaan buku kas Daerah; h. melaksanakan penyusunan laporan harian mengenai posisi kas Daerah;
- 7) melaksanakan rekonsiliasi buku kas Daerah dengan laporan bank;
- 8) melaksanakan pengelolaan investasi Daerah setara kas;
- 9) menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama dengan bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk dalam rangka penempatan uang Daerah; k. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- 10) melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas Daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- 11) melaksanakan koordinasi pelaksanaan piutang dan utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang Daerah sebagai optimalisasi kas;
- 12) melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas surat perintah pencairan dana dengan instansi terkait;
- 13) menyiapkan bahan penyusunan anggaran kas belanja dan pembiayaan;
- 14) mengoordinasikan fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- 15) melaksanakan pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
- 16) melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- 17) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **1.1.14 Tugas dan Fungsi Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan**

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahkan Subbidang dan Sub koordinator. Subbidang dan sub koordinator dipimpin oleh Kepala Subbidang dan pejabat fungsional AKD sub koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Dalam melaksanakan tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program dan kegiatan Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- 2) perumusan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan;
- 3) pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- 4) penyusunan laporan keuangan pemerintahan Daerah;
- 5) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas akuntansi dan pelaporan;
- 6) pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang akuntansi dan pelaporan;
- 7) pembinaan, pemantauan dan evaluasi tata kelola keuangan BLUD;
- 8) pelaksanaan fasilitasi penetapan status BLUD;
- 9) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- 10) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas:

#### **1.1.15 Subbidang Akuntansi**

- 1) menyusun program dan kegiatan Subbidang Akuntansi;
- 2) mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi pada tingkat satuan kerja pengelola keuangan Daerah dan pejabat pengelola keuangan Daerah;
- 3) melaksanakan verifikasi terhadap pencatatan transaksi keuangan satuan kerja pengelola keuangan Daerah secara sistematis dan kronologis;
- 4) melaksanakan verifikasi terhadap pencatatan transaksi keuangan pejabat pengelola keuangan Daerah secara sistematis dan kronologis;
- 5) melaksanakan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- 6) melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- 7) melaksanakan evaluasi atas laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dari Perangkat Daerah, badan layanan umum Daerah dan satuan kerja pengelola keuangan Daerah;



- 8) melaksanakan pencatatan ke dalam laporan keuangan ata penerimaan dan pengeluaran yang sumber dananya bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- 9) menyiapkan bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- 10) melakukan analisa permasalahan akuntansi
- 11) melaksanakan pembinaan di bidang penatausahaan dan akuntansi keuangan Daerah kepada pejabat pengelola keuangan dan bendahara Perangkat Daerah;
- 12) melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- 13) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan bidang tugasnya.

#### **1.1.16 Subbidang Pelaporan**

- 1) menyusun program dan kegiatan Subbidang Pelaporan;
- 2) melaksanakan verifikasi, evaluasi dan analisis terhadap laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran Perangkat Daerah dalam rangka rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran;
- 3) melaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Perangkat Daerah dan pejabat pengelola keuangan Daerah;
- 4) melakukan analisa permasalahan pelaporan pertanggungj awaban;
- 5) melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/ atasan terkait dengan bidang tugasnya.

#### **1.1.17 Substansi Badan Layanan Umum Daerah**

- 1) menyusun program dan kegiatan kebijakan akuntansi dan pelaporan;
- 2) menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis terkait laporan keuangan BLUD dan laporan pertanggungjawaban BLUD;
- 3) memfasilitasi proses administrasi penetapan status BLUD;
- 4) menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi tata kelola keuangan BLUD;
- 5) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan pada tingkat SKPKD dan satuan keaja Perangkat Daerah;
- 6) menyiapkan bahan pembinaan pelaporan kepada pejabat pengelola keuangan dan bendahara Perangkat Daerah;

- 7) menyiapkan bahan pembinaan penatausahaan di bidang akuntansi dan pelaporan; h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- 8) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **1.1.18 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah membawahkan Subbidang dan Sub koordinator. Subbidang dan sub koordinator dipimpin oleh Kepala Subbidang dan pejabat fungsional AKD sub koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang setiap Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 2) perumusan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan aset Daerah;
- 3) pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan di bidang pengelolaan aset Daerah;
- 4) pelaksanaan tugas pengelola aset Daerah dalam hal penandatanganan saksi batas terhadap tanah milik Pemerintah Daerah;
- 5) pelaksanaan pengelolaan aset Daerah;
- 6) perumusan kebijakan dan tata laksana pengelolaan aset Daerah;
- 7) pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan aset Daerah;
- 8) penyusunan standar harga barang dan jasa Daerah;
- 9) pelaksanaan fasilitasi penerimaan aset daerah yang bersumber dari non APBD;
- 10) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- 11) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri atas:

#### **1.1.19 Subbidang Analisa Kebutuhan dan Penghapusan Barang Milik Daerah**

- 1) menyusun program dan kegiatan Subbidang Analisa Kebutuhan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;

- 2) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi proses pendaftaran dan pencatatan aset Daerah ke dalam daftar aset Daerah menurut penggolongan dan kodifikasi barang;
- 3) melaksanakan administrasi penetapan status penggunaan aset Daerah;
- 4) memfasilitasi pencatatan aset Daerah ke dalam daftar barang pengguna/daftar barang kuasa pengguna;
- 5) menyiapkan bahan kebijakan penatausahaan aset Daerah;
- 6) mengoordinasikan pencatatan kartu inventarisasi barang dan kartu inventarisasi ruangan;
- 7) memfasilitasi mutasi barang Perangkat Daerah ke dalam daftar rekapitulasi mutasi barang;
- 8) mengoordinasikan penetapan pengurus barang dan pejabat penatausahaan pengguna barang;
- 9) melaksanakan pengoordinasian inventarisasi aset Daerah dari pengurus barang Perangkat Daerah;
- 10) melaksanakan sensus aset Daerah;
- 11) melaksanakan koordinasi dalam rangka penatausahaan aset Daerah;
- 12) melakukan pengawasan dan pemantauan penatausahaan aset Daerah;
- 13) melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan aset Daerah;
- 14) menyusun laporan aset Daerah sebagai bahan untuk menyusun bahan neraca Daerah;
- 15) melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas pengelolaan aset Daerah;
- 16) menyiapkan dokumen administrasi dalam rangka proses penggunaan, aset Daerah;
- 17) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penggunaan, aset Daerah;
- 18) melaksanakan penatausahaan penyerahan sarana, prasarana dan utilitas dari kawasan perumahan;
- 19) melaksanakan administrasi dan fasilitasi penetapan lokasi penggunaan tanah milik pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 20) melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan penatausahaan aset Daerah;
- 21) melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- 22) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **1.1.20 Subbidang Pengamanan Barang Milik Daerah**

- 1) menyusun program dan kegiatan Subbidang Pengamanan Barang Milik Daerah;

- 2) melakukan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengamanan aset Daerah secara administratif, fisik, dan hukum;
- 3) melaksanakan perlindungan aset Daerah berupa pertanggung jawaban keselamatan bangunan gedung milik Pemerintah Daerah;
- 4) menyimpan dan mengamankan dokumen kepemilikan aset Daerah;
- 5) menyusun daftar dan laporan perkembangan aset Daerah yang bersengketa dengan pihak lain;
- 6) menyusun kebijakan pengelolaan aset Daerah;
- 7) melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan pengamanan dan kebijakan pengelolaan aset Daerah;
- 8) melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- 9) melaksanakan tugas lainnya diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **1.1.21 Substansi Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah**

- 1) menyusun program dan kegiatan di bidang penatausahaan aset daerah;
- 2) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi proses pendaftaran dan pencatatan aset Daerah ke dalam daftar aset Daerah menurut penggolongan dan kodifikasi barang;
- 3) melaksanakan administrasi penetapan status penggunaan aset Daerah;
- 4) emfasilitasi pencatatan aset Daerah ke dalam daftar barang pengguna/daftar barang kuasa pengguna;
- 5) menyiapkan bahan kebijakan penatausahaan aset Daerah;
- 6) mengoordinasikan pencatatan kartu inventarisasi barang dan kartu inventarisasi ruangan;
- 7) memfasilitasi mutasi barang Perangkat Daerah ke dalam daftar rekapitulasi mutasi barang;
- 8) mengoordinasikan penetapan pengurus barang dan pejabat penatausahaan pengguna barang;
- 9) melaksanakan pengoordinasian inventarisasi aset Daerah dari pengurus barang Perangkat Daerah;
- 10) melaksanakan sensus aset Daerah;
- 11) melaksanakan koordinasi dalam rangka penatausahaan aset Daerah;
- 12) melakukan pengawasan dan pemantauan penatausahaan aset Daerah;
- 13) melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan aset Daerah;

#### **1.1.22 Tugas dan Fungsi Kepala UPTD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan**

UPTD merupakan UPTD operasional Badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan. Ketentuan mengenai pembentukan UPTD, uraian tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Wali Kota

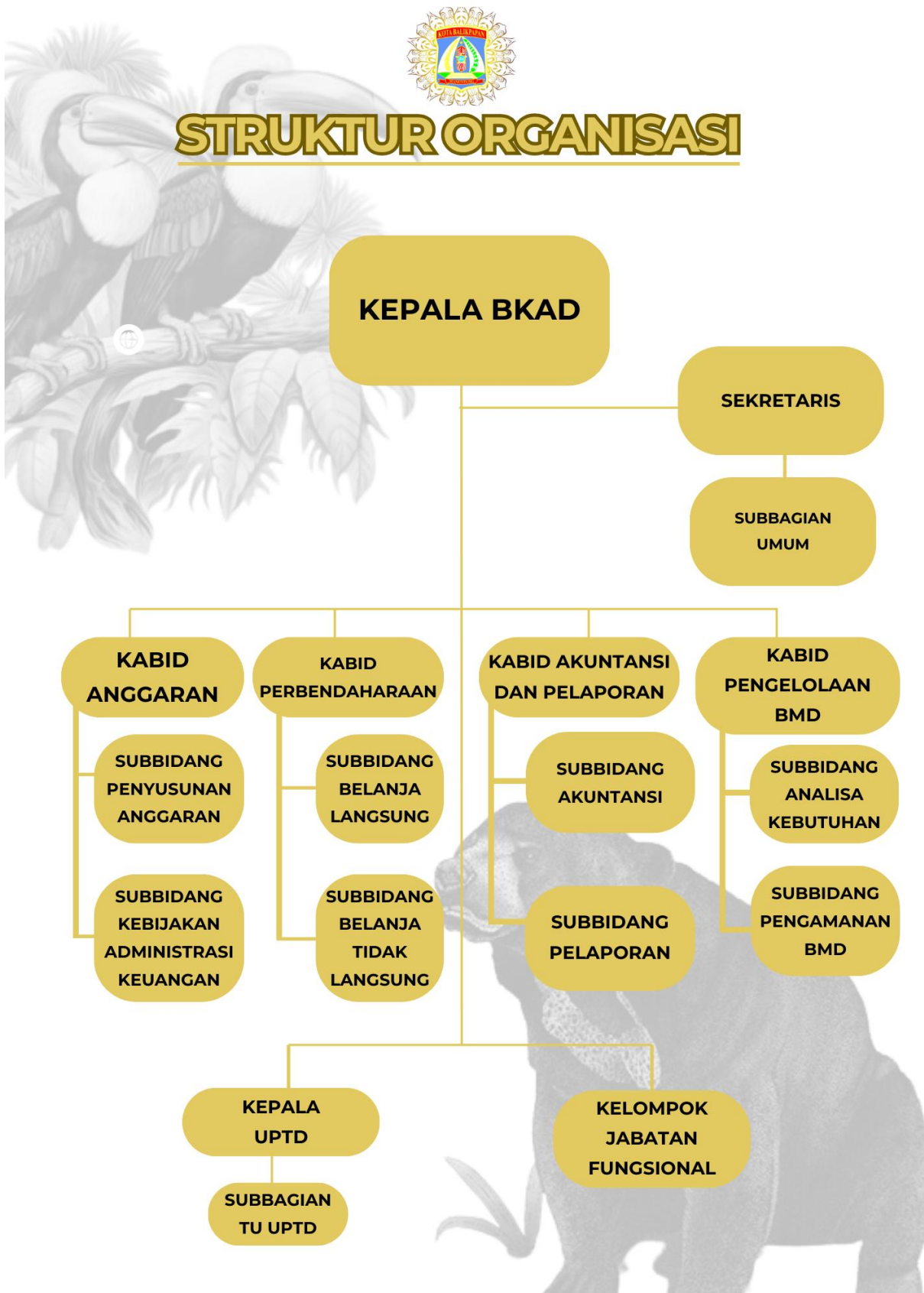
#### **1.1.23 Tugas Jabatan Fungsional Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang dan secara operasional dikoordinasikan dan bertanggung jawab kepada kepala Subbidang sesuai pembidangannya. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta uraian tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Untuk lebih jelasnya bagan struktur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi BKAD Kota Balikpapan

1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah BKAD Kota Balikpapan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan khususnya sumber daya aparatur yang

merupakan mesin penggerak roda Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.

1.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Adapun sumber daya manusia (SDM) pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan sebagai berikut:

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan sebagai berikut:

Tabel 1. SDM BKAD Kota Balikpapan berdasarkan pangkat/golongan

No	Tingkat Pendidikan	Golongan	Jenis Kelamin		JUMLAH
			L	P	
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1	0	1
2	Pembina	IV/a	3	1	4
3	Penata Tk.I	III/d	3	5	8
4	Penata	III/c	6	5	11
5	Penata Muda Tk I	III/b	3	6	9
6	Penata Muda	III/a	5	5	10
7	Pengatur Tk I	II/d	1	1	2
8	Pengatur	II/c	9	8	17
9		PPPK Gol/IX	2	1	3
10		PPPK Gol/VII	2	3	5
11		PPPK Gol/V	14	12	26
12		PPPK Gol/I	6	0	6
	JUMLAH		55	47	102

Sumber: Data Kepegawaian BKAD Kota Balikpapan Per Mei 2025

b. Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tingkat Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah aparatur sipil negara berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		JUMLAH
		L	P	
1	S-2	3	0	3
2	S-1	12	14	26
3	D-IV	0	0	0
4	D-III	12	18	30
5	SMA	15	5	20
6	SMK	7	10	17
7	SD	6	0	6

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		JUMLAH
		L	P	
	JUMLAH	55	47	102

Sumber Data: Data Kepegawaian BKAD Kota Balikpapan Per Mei 2025

- c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional hasil Penyetaraan sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Penyetaraan

NO	JABATAN	ESELON	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			L	P	
1	Kepala Badan	JPT	1	0	1
2	Sekretaris	Administrator	1	0	1
3	Kepala Bidang	Administrator	3	1	4
4	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	Pengawas	5	6	11
5	Pejabat Fungsional hasil penyetaraan	JF	2	2	4
JUMLAH			12	9	21

Sumber Data: Data Kepegawaian BKAD Kota Balikpapan Per Mei 2025

- d. Jumlah Pegawai Non Aparatur Sipil Negara sebagai berikut

Tabel 4. Jumlah pegawai non aparatur sipil negara

NO	SEKRETARIAT/BIDANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	Sekretariat	0	1	1
2	Bidang Anggaran	0	0	0
3	Bidang Perbendaharaan	0	1	1
4	Bidang Akuntansi	0	0	0
5	Bidang Pengelolaan BMD	1	1	2
6	UPTD	27	7	34
JUMLAH				38

Sumber: Data Kepegawaian BKAD Kota Balikpapan Per Mei 2025

1.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, BKAD Kota Balikpapan di dukung sarana dan prasarana kantor sebagaimana tercantum pada tabel berikut:



Tabel 5. Sarana dan prasarana BKAD Kota Balikpapan

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		874	
	KOMPUTER	428	
	P.C Unit	113	Baik
	Lap Top	55	Baik
	Note Book	31	Baik
	Tablet PC	5	Baik
	Komputer Unit Lainnya	2	Baik
	Hard Disk	4	Baik
	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	6	Baik
	Monitor	1	Baik
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	102	Baik
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	16	Baik
	External	6	Baik
	External/Portable Hardisk	36	Baik
	Peralatan Personal Komputer lainnya	12	Baik
	Server	10	Baik
	Router	3	Baik
	Wireless Access Point	1	Baik
	Switch	12	Baik
	Acces Point	11	Baik
	Peralatan Jaringan lainnya	2	Baik
	ALAT ANGKUTAN	30	
	Station Wagon	11	Baik
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah )	1	Baik
	Pick Up	3	Baik
	Sepeda Motor	14	Baik
	kapal terbang lainnya (dst)	1	Baik
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	6	
	Global Positioning System	4	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang
	Scanner (Universal Tester)	1	Baik
	Alat Ukur Universal lainnya (dst)	1	Baik
	<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>	343	
	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	2	Baik
	Mesin Hitung Elektronik/ Calculator	1	Baik
	Mesin Fotocopy Folio	1	Baik
	Mesin Fotocopy Double Folio	2	Baik
	Lemari Besi/Metal	18	Baik
	Lemari Kayu	4	Baik
	Filing Cabinet Besi	2	Baik
	Brandkas	10	Baik
	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	Baik
	Lemari Kaca	1	Baik
	Lemari Makan	2	Baik
	CCTV - Camera Control Television System	3	Baik
	Alat Penghancur Kertas	14	Baik
	Mesin Absensi	3	Baik
	LCD Projector/Infocus	4	Baik
	Alat Perekam Suara (Voice pan)	2	Baik
	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Baik
	Papan Pengumuman	39	Baik
	Alat Kantor Lainnya	8	Baik
	Meja Kerja Besi/Metal	1	Baik
	Meja Rapat	5	Baik
	Kursi Putar	8	Baik
	Meja Computer	5	Baik
	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik
	Lemari Es	6	Baik
	A.C. Window	10	Baik
	A.C. Split	15	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang
	Kompor Listrik (Alat Dapur)	1	Baik
	Televisi	2	Baik
	Microphone Tabel Stand	10	Baik
	Mic Conference	10	Baik
	Unit Power Supply	16	Baik
	Dispenser	16	Baik
	Lemari Besi/Metal	18	Baik
	Lemari Kayu	4	Baik
	Filing Cabinet Besi	2	Baik
	Brandkas	10	Baik
	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	Baik
	Lemari Kaca	1	Baik
	Lemari Makan	2	Baik
	CCTV - Camera Control Television System	3	Baik
	Alat Penghancur Kertas	14	Baik
	Mesin Absensi	3	Baik
	LCD Projector/Infocus	4	Baik
	Alat Perekam Suara (Voice pan)	2	Baik
	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Baik
	Papan Pengumuman	39	Baik
	Lemari Besi/Metal	18	Baik
	Lemari Kayu	4	Baik
	Filing Cabinet Besi	2	Baik
	Brandkas	10	Baik
	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	Baik
	Lemari Kaca	1	Baik
	Lemari Makan	2	Baik
	CCTV - Camera Control Television System	3	Baik
	Alat Penghancur Kertas	14	Baik
	Mesin Absensi	3	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang
	LCD Projector/Infocus	4	Baik
	Alat Perekam Suara (Voice pan)	2	Baik
	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Baik
	Papan Pengumuman	39	Baik
	Papan Tulis	1	Baik
	Alat Kantor Lainnya	8	Baik
	Meja Kerja Besi/Metal	1	Baik
	Meja Rapat	5	Baik
	Kursi Putar	8	Baik
	Meja Computer	5	Baik
	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik
	Lemari Es	6	Baik
	A.C. Window	10	Baik
	A.C. Split	15	Baik
	Kompor Listrik (Alat Dapur)	1	Baik
	Televisi	2	Baik
	Microphone Tabel Stand	10	Baik
	Mic Conference	10	Baik
	Unit Power Supply	16	Baik
	Dispenser	16	Baik
	Gordyin/Kray	5	Baik
	Alat Rumah Tangga Lainnya	11	Baik
	Alat Pemadam/Portabel	10	Baik
	Meja Tamu Biasa	2	Baik
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3	Baik
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	7	Baik
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	Baik
	<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>		
	Kursi KerjaPegawai Non Struktural	44	Baik
	Kursi Kerja Pejabat lainnya	20	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang
	<b>ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN</b>	55	
	<b>PEMANCAR</b>		
	Audio Amplifier	1	Baik
	Microphone/Wireless MIC	2	Baik
	Microphone/Boom Stand	1	Baik
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	21	Baik
	peralatan studio audio lainnya (dst)	5	Baik
	Camera Electronic	5	Baik
	Rak Peralatan	1	Baik
	Camera Conference	10	Baik
	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	1	Baik
	Kompas Geologi	2	Baik
	Clinometer	1	Baik
	Alat Studio Pemetaan lainnya	2	Baik
	Telephone Mobile	1	Baik
	Handy Talky (HT)	2	Baik
	<b>ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN</b>	2	
	Alat Kedokteran umum lainnya	2	Baik
	<b>ALAT LABORATORIUM</b>	10	
	Alat laboratorium bahan bangunan konstruksi lainnya (dst)	1	Baik
	Video Printer	2	Baik
	Distiling Apparatus	4	Baik
	Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran)	1	Baik
	Hardware Conf Off-Line Computer	1	Baik
	Wireless Data Tranmission System	1	Baik
<b>2</b>	<b>BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PENGELOLA BARANG)</b>	<b>8</b>	
	<b>ALAT BESAR</b>	1	
	Dump Truck	1	Baik
	<b>ALAT ANGKUTAN</b>	7	

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Baik
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PENGELOLA BARANG)		
	Pick Up	2	Baik
	Sepeda Motor	3	Baik
	kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya (dst)	1	Baik
3	UPT PENGELOLAAN DAN PERAWATAN GEDUNG PEMERINTAH	147	
	ALAT BESAR	11	
	compacting equipment lainnya (dst)	1	Baik
	pompa Air	12	Baik
	pompa lainnya (dst)	30	Baik
	Komputer	11	Baik
	Komputer jaringan lainnya (dst)	1	Baik
	P.C Unit	4	Baik
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	Baik
	External/Portabel Hardisk	2	Baik
	<b>ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>	38	
	Mesin Las Listrik	2	Baik
	Mesin Bor Tangan	2	Baik
	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	6	Baik
	perkakas bengkel khusus lainnya (dst)	2	Baik
	Tool Kit Set	1	Baik
	Tool Kit Box	2	Baik
	Termometer Standar	21	Baik
	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	2	Baik
	<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>	85	
	Lemari Besi/Metal	10	Baik
	CCTV - Camera Control Television System	1	Baik
	White Board	5	Baik
	Papan Pengumuman	11	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang
	Alat Kantor Lainnya	20	Baik
	Tempat Tidur Besi	4	Baik
	Mesin Pemotong Rumput	3	Baik
	Alat Pembersih lainnya	4	Baik
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		
	A.C. Window	2	Baik
	A.C. Split	13	Baik
	Kipas Angin	2	Baik
	Alat Dapur lainnya	2	Baik
	Sound System	1	Baik
	Unit Power Supply	1	Baik
	Tangga Aluminium	3	Baik
	Dispenser	2	Baik
	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Baik
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DANPEMANCAR	10	Baik
	Camera Electronic	2	Baik
	Handy Talky (HT)	8	Baik
	ALAT LABORATORIUM	3	
	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)	3	Baik

Sumber Data: Data Subbagian Umum BKAD Kota Balikpapan Per Mei 2025

1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Balikpapan adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan aset daerah Kota Balikpapan.

Jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh BKAD Kota Balikpapan diantaranya:

- a. Jenis Pelayanan Bidang Perbendaharaan:
  - 1) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
  - 2) Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)
  - 3) Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)
  - 4) Penerbitan SK pengelola keuangan perangkat daerah
- b. Jenis Pelayanan Bidang Anggaran:
  - 1) Usulan pergeseran anggaran perangkat daerah
  - 2) Usulan perubahan anggaran perangkat daerah
  - 3) Evaluasi APBD Kab/Kota
  - 4) Pengelolaan Bantuan Keuangan

- c. Jenis Pelayanan Bidang Akuntansi:
  - 1) Konsultasi penyusunan laporan keuangan perangkat daerah
  - 2) Evaluasi pertanggungjawaban Kab/Kota
  - 3) Pengelolaan Dana Darurat Mendesak
  - 4) Pengelolaan Dana Bagi Hasil
- d. Jenis Pelayanan Bidang Pengelolaan BMD:
  - 1) Penyusunan daftar RKBMD dan RKPBM dan verifikasi.
  - 2) Usulan SHS dari perangkat daerah.
  - 3) Konsultasi penyusunan laporan inventarisasi BMD perangkat daerah.
  - 4) Pendampingan penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan dan/atau pemindahtanganan kepada perangkat daerah.
  - 5) Menelaah dan menindaklanjuti usulan penggunaan BMD (Penetapan Status Penggunaan, Penetapan Status Penggunaan Sementara, Alih Status Penggunaan dan Penggunaan Sementara).
  - 6) Pemanfaatan berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna, Kerjasama penyediaan infrastruktur, pemanfaatan tanah hak pengelolaan perangkat daerah.
  - 7) Pendampingan penyusunan laporan BMD perangkat daerah.
  - 8) Pembinaan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kab/Kota.

#### **1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan**

Dalam melaksanakan pelayanan, BKAD Kota Balikpapan memiliki keterkaitan dengan pihak lain dalam memberikan pelayanan dan berkolaborasi dengan mitra lainnya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan memberikan layanan kepada masyarakat umum (bidang Pengelolaan BMD), perangkat daerah, dan perangkat daerah dalam penyusunan APBD.

##### **1.4.1 Mitra BKAD Kota Balikpapan**

Badan Keuangan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan dalam memberikan pelayanan selalu berkolaborasi dengan mitra kerja antara lain:

- a. PT. Taspen
- b. BPJS
- c. Bank Kaltimara
- d. BPK RI
- e. BPKP Perwakilan Kalimantan Timur
- f. DJKN Perwakilan Kalimantan Timur
- g. SKPD di lingkungan Kota Balikpapan.

##### **1.4.2 Dukungan BUMN dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah**

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan dalam memberikan pelayanan selalu berkolaborasi dengan BUMN antara lain:

- a. Perumda Manuntung Sukses Balikpapan
- b. Perumda Tirta Manuntung Balikpapan
- c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan melaksanakan kerja sama daerah dengan Provinsi Kalimantan Timur terkait Dana Transefer dari Provinsi Kalimantan Timur.



Berdasarkan Rencana Strategis BKAD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Keuangan dan Aset Kota Balikpapan pada tahun 2023 Rencana Kerja Program dan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 melaksanakan 3 (tiga) Program 15 Kegiatan, hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Kota Balikpapan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Terdiri dari 3 Program yaitu:
  - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/kota
  - 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
  - 3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- b. Terdiri dari 15 Kegiatan yaitu:
  - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - 4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
  - 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 6) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 10) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
  - 11) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
  - 12) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
  - 13) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - 14) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
  - 15) Pengelolaan Barang Milik Daerah

BKAD Kota Balikpapan telah melakukan tugas dan fungsinya sebagai unsur pendukung tugas Wali kota di bidang pengelola keuangan dan Barang Milik Daerah, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja BKAD dari tahun 2021 – 2025 sebagaimana terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6. T-C.23 Capaian Kinerja Pelayanan BKAD

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN	179.354.535.904	115.609.435.241	158.248.277.851	122.325.166.463,37	118.687.035.459,38	146.154.544.162	84.110.316,326,57	120.643.183.887	91.232.297,558,01		81,49	72,75	76,24	74,58	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	179.354.535.904	115.609.435.241	158.248.277.851	122.325.166.463,37	118.687.035.459,38	146.154.544.162	84.110.316,326,57	120.643.183.887	91.232.297,558,01		81,49	72,75	76,24	74,58	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	335.000.000	199.997.700	373.000.000	285.999.600	288.057.620	330.270.075	129.587.333	322.338.673	245.582.271		98,59	64,79	86,42	85,87	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.876.279.000	16.820.648.377	19.357.259.803	13.588.986.400	26.956.166.961,38	31.695.725.263	8.131.681.534	9.607.442.598	11.406.170.273,00		96,41	48,34	49,63	88,94	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	19.970.800	20.000.000	20.000.000	-	-	6.352.471	11.669.000		0	0	31,81	58,35	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	49.999.900	55.436.900	60.499.600	60.297.635	-	49.643.900	55.019.417	58.463.250		0	99,29	99,25	96,63	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	275.000.000	568.875.000	781.920.100	781.920.100	-	206.786.826	394.067.956	609.890.562		0	75,2	69,27	78	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.889.667.600	2.282.198.400	5.152.458.490	5.141.088.011	3.245.269.735	1.811.647.722	2.128.405.686	4.754.650.438	3.891.965.128		95,87	93,26	92,28	75,7	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	928.500.000	779.874.300	525.345.846	709.755.000	-	875.410.000	655.338.400	475.700.000		0	94,28	84,03	90,55	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	666.958.076	743.470.900	717.391.000	1.168.872.500	715.884.000	566.363.944	707.870.964	657.502.464	568.314.144		84,92	95,21	91,65	48,62	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	775.000.000	1.355.000.000	1.598.207.888	1.923.954.200	1.942.281.050	574.847.201	1.162.982.752	1.220.075.306	1.090.175.496		74,17	85,88	76,34	56,66	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	120.228.031.228	60.146.314.164	53.645.375.120	27.557.681.729,37	28.009.337.874	90.825.488.016	41.355.685.142,37	34.509.193.919	16.771.682.374		75,54	68,76	64,33	60,86	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.263.000.000	3.392.238.300	5.728.219.500	4.258.666.500	6.244.621.375	1.888.944.782	2.848.122.635	4.331.345.030	2.472.000.560		88,47	83,96	75,61	58,05	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.194.500.000	1.984.900.000	2.200.000.000	2.868.849.500	3.406.235.000	1.134.352.906	1.825.362.663	1.854.743.093	2.454.969.722		94,96	91,96	84,31	85,57	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	710.000.000	2.677.179.800	3.075.645.200	2.693.106.000	2.761.620.000	524.464.479	1.485.196.346	2.351.357.247	1.982.505.560		73,87	55,48	76,45	73,61	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	115.010.531.228	50.211.396.064	40.480.510.420	13.687.686.429	13.045.950.324	86.268.846.304	33.625.006.109	24.063.664.572	6.033.732.577		75,01	66,97	59,45	44,08	
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1.050.000.000	1.880.600.000	2.161.000.000	4.049.373.300	2.550.911.175	1.008.879.545	1.571.997.389	1.908.083.977	3.828.473.955		96,08	83,59	88,3	94,54	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	22.583.600.000	32.808.305.800	75.980.428.550	71.270.818.477	55.958.065.484	20.350.201.942	29.362.262.189	68.461.202.245	56.102.685.065,01		90,11	89,5	90,1	78,72	
Pengelolaan Barang Milik Daerah	22.583.600.000	32.808.305.800	75.980.428.550	71.270.818.477	55.958.065.484	20.350.201.942	29.362.262.189	68.461.202.245	56.102.685.065		90,11	89,5	90,1	78,72	

### 1.4.3 Capaian Kinerja Pelayanan

Capaian kinerja pelayanan BKAD Kota Balikpapan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada periode tahun - tahun sebelumnya. Capaian indikator kinerja dapat dilihat dengan membandingkan realisasi indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja pelayanan BKAD Kota Balikpapan selama kurun waktu 2021-2024 tercantum pada tabel berikut:

Tabel 7. Capaian kinerja pelayanan BKAD

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah BKAD	n/a	27,00	28,75	30,5	32,25	n/a	32,16	n/a	n/a	n/a	n/a	119,11	n/a	n/a	n/a
2	Nilai SAKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan	n/a	55	58,66	65	70		54,05	58,66	71,16	n/a	n/a	98,27	100,00	109,48	n/a
3	Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	n/a	13,57	13,57	13,57	13,57	n/a	13,63	13,14	13,148	n/a	n/a	95	96,83	96,89	n/a
4	pengalokasian anggaran belanja	n/a	19,138	19,138	19,138	19,138	n/a	20	20	20	n/a	n/a	96	104,50	104,50	n/a
5	Transparansi pengelolaan keuangan daerah	n/a	11,638	12,2	12,2	12,5	n/a	14,48	15	15	n/a	n/a	97	122,95	122,95	n/a
6	Penyerapan Anggaran	n/a	13,333	13,333	13,333	13,333	n/a	13,33	15	15	n/a	n/a	98	112,50	112,50	n/a
7	Kondisi Keuangan Daerah	n/a	6,552	6,88	6,88	7	n/a	4,8	3,9	3,92	n/a	n/a	99	56,69	56,98	n/a
8	Opini Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	n/a	100	100	100	100	n/a
9	Indek kepuasan masyarakat (IKM) Internal perangkat Daerah	n/a	74,5	76	77,5	79,5	n/a	74,5	76	77,5	n/a	n/a	98	100,00	100,00	n/a
10	Persentase Tahapan Penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, PAPBD, dan LKPD serta Realisasi APBD yang Tepat Waktu	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	100	100,00	100,00	n/a
11	Prensentase Peningkatan BMD yang terkelola	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	100	100,00	100,00	n/a

### 1.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Salah satu agenda pembangunan daerah Kota Balikpapan adalah penguatan kelembagaan pemerintah yang mengikuti kaidah-kaidah good corporate governance (GCG) serta berbasis pada visi dan misi. Namun pada kenyataannya sampai dengan saat ini, reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Banyaknya permasalahan birokrasi belum sepenuhnya teratasi baik dari sisi internal maupun eksternal.

Berdasarkan evaluasi kinerja BKAD Kota Balikpapan selama 5 (lima) tahun capaian kinerja yang telah dilaksanakan, maka di dapat sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh BKAD Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan.

Berikut ini kami tampilkan, matriks pemetaan kendala yang dihadapi hingga potensi permasalahan yang mungkin terjadi di periode 2025 – 2029 . Adapun pemetaan permasalahan pelayanan BKAD Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

*Tabel 8. Matriks pemetaan kendala dan pemetaan masalah*

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya sinkronisasi Perencanaan dengan penganggaran tahunan (APBD)	1.Ketidakefisienan alokasi anggaran;  2.program tidak tepat sasaran	1.ketidakpastian informasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat;  2. Koordinasi lintas perangkat daerah belum optimal;
2	Keterlambatan penyusunan dan pengesahan APBD	1. Terhambatnya pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan dan penganggaran	1. Koordinasi lintas perangkat daerah belum optimal  2. terlambatnya informasi Kebijakan dari pemerintah pusat  3. Kurangnya komitmen legislatif dan eksekutif dalam pembahasan anggaran
3	Rendahnya partisipasi publik dalam proses penganggaran	Program tidak sesuai kebutuhan riil masyarakat	1. Sosialisasi perencanaan pembangunan tidak dihadiri seluruh lapisan masyarakat (terbatas);  2. kurang transparansi informasi anggaran  3. Publikasi Anggaran belum seluruhnya dapat dipahami oleh masyarakat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4	Laporan Keuangan Perangkat Daerah belum tepat Waktu	Keterlambatan Penyampaian Laporan keuangan perangkat Daerah	Adanya Perubahan Peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan petugas Akutansi Perangkat Daerah
5	Laporan BMD Perangkat Daerah belum disampaikan tepat Waktu	Keterlambatan Penyampaian Laporan BMD Per Semester	Adanya Perubahan Peraturan Perundang-undangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah
6		<p>1. Kebutuhan riil BMD tidak tercermin secara akurat dalam perencanaan BMD.</p> <p>2. Terjadi pemborosan atau ketidaktepatan pengadaan BMD karena perencanaan yang tidak matang.</p>	

### 1.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari telaahan isu-isu strategis terkait tupoksi BKAD Kota Balikpapan serta telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang di paparkan sebagai berikut:

Tabel 9. Isu strategis BKAD Kota Balikpapan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Balikpapan Sebagai Smart city (smart governance) Digitalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aet	Dokumen Penganggaran belum ramah lingkungan	<b>Penerapan penggunaan kertas dan kegiatan tatap muka ke teknologi digital belum optimal</b>	Mobilisasi ASN untuk tatap muka dan membawa Hardfile/Hardcopy untuk mengerjakan dokumen keuangan dan aset menjadi salah satu penyumbang polusi udara hingga pemborosan kertas	<i>Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah sesuai isu RPJM</i>	Sistem belum optimal, penggunaan kertas masih mendominasi	Pengelolaan Keuangan dan Aset yang transparan dan Akuntabel
	Dokumen Pertanggungjawaban belum ramah lingkungan					
Balikpapan Sebagai Kota mice (akuntabilitas keuangan dan optimalisasi aset)	Belum optimalnya proses Perencanaan dengan penganggaran tahunan (APBD)	<b>Tata Kelola Keuangan dan BMD Pemerintah Daerah yang belum optimal</b>	Kondisi Ekonomi Global yang fluktuatif	Alokasi Transfer Ke Daerah dari Pemerintah Pusat tidak konsisten	Alokasi Transfer ke Daerah dari Provinsi tidak konsisten	
	Laporan Keuangan Perangkat Daerah belum tepat Waktu		Indeks Korupsi Indonesia	Salah satu ukuran prestasi Pemerintah Daerah yang fluktuatif	Opini BPK atas LKPD Pemerintah Daerah dapat menurun	
	Laporan BMD Perangkat Daerah belum disampaikan tepat Waktu					

Balikipapan Sebagai Pusat Jasa dan Industri (Pemanfaatan Aset Daerah)	Pengamanan dan Pemanfaatan BMD masih belum optimal		Kepastian hukum kepemilikan aset negara dan daerah	Penilaian MCP KPK yang semakin detail	Pengamanan aset Provinsi dan Kota belum terselesaikan	
---	---	--	--	---	--	--

## **BAB II**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **1.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029**

Pada dasarnya tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki lima pilar utama yaitu inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter.

Untuk menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 yang akan datang dengan didasarkan pada isu-isu analisis strategis disertai indikator kinerja tujuan yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai selama kurun waktu tersebut dan secara bertahap pencapaiannya.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan kurun waktu 2025 – 2029.

#### **TUJUAN :**

#### **TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL**

##### **Indikator Tujuan :**

**Nilai Dimensi Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran  
(Nilai)**

**Nilai Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD (Poin)**

**Nilai Dimensi Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Poin)**

**Nilai Dimensi Penyerapan Anggaran (Poin)**

**Nilai Dimensi Kondisi Keuangan Daerah (Poin)**

**Nilai Dimensi Capaian Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
(Poin)**

Tujuan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan adalah “Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel” dengan indikator tujuan adalah Nilai Dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan spesifik, mudah dicapai, rasional memperhatikan isu strategis daerah, disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun.

Adapun **Sasaran** yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan kurun waktu 2025 – 2029 adalah:

#### **SASARAN I :**

#### **MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BERKUALITAS EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL**

##### **Indikator Sasaran :**



<b>Persentase Kesesuaian Pagu KUA PPAS dengan APBD (%)</b> <b>Persentase pemenuhan penganggaran mandatory spending (%)</b> <b>Persentase Pemenuhan Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah yang Diupload Tepat Waktu di Website Resmi Pemda (%)</b> <b>Persentase Penyerapan Anggaran (%)</b> <b>Persentase Perhitungan Rasio keuangan berdasarkan LKPD (%)</b> <b>Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah (Predikat)</b>
<b>SASARAN II :</b> <b>MENINGKATNYA PENGELOLAAN BMD YANG BERKUALITAS EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL</b>
Indikator Sasaran : <b>Nilai Indeks Pengelolaan Aset (Poin)</b>
<b>SASARAN III :</b> <b>MENINGKATNYA NILAI IMPLEMENTASI SAKIP</b>
Indikator Sasaran : <b>Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)</b>

Berikut ini matriks yang menggambarkan tujuan, sasaran serta indikator kinerja yang ingin dicapai selama kurun waktu periode Renstra Tahun 2025 – 2029:

<b>TUJUAN</b>	<b>Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel</b>		
<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Dimensi Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran</li> <li>2. Nilai Dimensi Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD</li> <li>3. Nilai Dimensi Transparansi pengelolaan keuangan daerah</li> <li>4. Nilai Dimensi Penyerapan Anggaran</li> <li>5. Nilai Dimensi Kondisi Keuangan Daerah</li> <li>6. Nilai Dimensi Capaian Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</li> </ol>		
<b>SASARAN</b>	Meningkatnya Nilai Implementasi SAKIP	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya Pengelolaan BMD yang berkualitas efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>Nilai AKIP Perangkat Daerah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Kesesuaian Pagu KUA PPAS dengan APBD (%)</li> <li>2. Persentase pemenuhan penganggaran mandatory spending (%)</li> <li>3. Persentase Pemenuhan Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah yang Diupload Tepat Waktu di Website Resmi Pemda (%)</li> <li>4. Persentase Penyerapan Anggaran (%)</li> <li>5. Persentase Perhitungan Rasio keuangan berdasarkan LKPD (%)</li> <li>6. Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah (Predikat)</li> </ol>	<b>Nilai Indeks Pengelolaan Aset</b>
<b>PROGRAM</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>Nilai Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik</li> <li>2. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar</li> <li>3. Persentase laporan keuangan tepat waktu</li> </ol>	Persentase Penambahan Nilai Tetap Aset
<b>BIDANG</b>	Sekretariat	Anggaran; Perbendaharaan; Akutansi dan Pelaporan	Pengelolaan Barang Milik Daerah

Gambar 2. Matriks tujuan, sasaran, dan indikator kinerja BKAD Kota Balikpapan

Tabel 10. Tujuan dan sasaran Renstra BKAD Kota Balikpapan

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas dan akuntabel		Nilai Dimensi Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	13,14	13,15	13,16	13,17	13,18	13,19
			Nilai Dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	20	20	20	20	20	20
			Nilai Dimensi Transparansi pengelolaan keuangan daerah	15	15	15	15	15	15
			Nilai Dimensi Penyerapan Anggaran	15	15	15	15	15	15
			Nilai Dimensi Kondisi Keuangan Daerah	3,92	3,93	3,94	3,95	3,96	3,97
			Nilai Dimensi Capaian Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	15	15	15	15	15	15

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel	Persentase kesesuaian pagu KUA PPAS dengan APBD	90%	90%	95%	95%	95%	100%
			Persentase pemenuhan penganggaran mandatory spending	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pemenuhan Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah yang diupload tepat waktu di website resmi Pemda	95%	95%	95%	100%	100%	100%
			Persentase Penyerapan Anggaran	86%	87%	87%	88%	88%	90%
			Persentase Perhitungan Rasio keuangan berdasarkan LKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Opini LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Meningkatnya Pengelolaan BMD yang berkualitas dan akuntabel	Nilai Indeks Pengelolaan Aset	2,6	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70	73	73,5	74	74,5	75

#### 1.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan telah mempersiapkan langkah-langkah strategis berupa rencana aksi yang akan ditempuh pada periode 2025 – 2029 sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini:

Tabel 11. Penetapan renstra perangkat daerah

TAHAP I 2025	TAHAP II 2026	TAHAP III 2027	TAHAP IV 2028	TAHAP V 2029
Optimalisasi peningkatan nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Kesadaran Perangkat Daerah dan Pejabat Eselon II dan III dalam penerapan capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Kesadaran diri Eselon IV dan Pejabat Fungsional dalam penerapan capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Kesadaran diri staf pelaksana dalam penerapan capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Evaluasi Budaya Kerja dalam penerapan capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

<b>TAHAP I 2025</b>	<b>TAHAP II 2026</b>	<b>TAHAP III 2027</b>	<b>TAHAP IV 2028</b>	<b>TAHAP V 2029</b>
Optimalisasi peningkatan nilai SAKIP	Peningkatan Kesadaran diri Eselon II dan III dalam penerapan SAKIP	Peningkatan Kesadaran diri Eselon IV dan Pejabat Fungsional dalam penerapan SAKIP	Peningkatan Kesadaran diri staf pelaksana dalam penerapan SAKIP	Evaluasi Budaya Kerja dalam penerapan SAKIP
Penerapan awal penilaian Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Peningkatan capaian Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Evaluasi penerapan instrumen dan capaian Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Peningkatan Kesadaran Perangkat Daerah dalam penerapan capaian Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Evaluasi Budaya Kerja dalam penerapan capaian Indeks Pengelolaan Aset Daerah
Peningkatan Pemahaman SDM pengelola keuangan dan BMD	Adaptasi Budaya kerja SDM pengelola keuangan dan BMD	Peningkatan Budaya kerja SDM pengelola keuangan dan BMD	Evaluasi Budaya kerja SDM pengelola keuangan dan BMD	Penilaian Budaya Kerja SDM pengelola keuangan dan BMD
Optimalisasi Penerapan Sistem Digital Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan kerjasama dengan stakeholder terkait	Optimalisasi Penyusunan Tata Kelola Sistem Digital Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penerapan Tata Kelola Sistem Digital Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Evaluasi Tata Kelola Sistem Digital Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penyempurnaan Tata Kelola Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana cara Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah. Strategi dan kebijakan yang ada di dalam renstra menjadi pedoman perumusan kegiatan dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada untuk lima tahun yang akan datang serta menetapkan strategi dan kebijakan secara lebih rinci, berdasarkan rencana aksi dituangkan dalam strategi dan kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran BKAD Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029, dapat dilihat dari matriks berikut ini:

Tabel 12. Arah kebijakan renstra BKAD Kota Balikpapan

NO	OPERASIONALISASI NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria)	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.	Perencanaan dan penganggaran yang akuntabel	Optimalisasi penggunaan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dan Forum teknis penyusunan APBD antar Perangkat Daerah	
			Optimalisasi Portal informasi publik tentang APBD yang mudah diakses dan mudah dipahami masyarakat.	
		Menguatkan aksi pencegahan korupsi	Meningkatkan komitmen antara eksekutif dan legislatif melalui pakta integritas/kesepakatan bersama	
			Penguatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan yang akuntabel, tepat waktu, dan penyajian pengungkapan	
2	Pengelolaan Barang Milik Daerah Meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.		Peningkatan sinergitas pengamanan Aset dengan pemangku kepentingan.	

**BAB III**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan BKAD Kota Balikpapan. Program dan kegiatan tersebut tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi BKAD Kota Balikpapan. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, dan dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (outcome) sebuah program dan hasil (output) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran.

Adapun Program Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2025–2029 yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Untuk memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi BKAD Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel - tabel dibawah ini.



Tabel 13. Rumusan Program/kegiatan/subkegiatan Renstra BKAD Daerah Kota Balikpapan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas dan akuntabel				Nilai Dimensi Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran		
					Nilai Dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD		
					Nilai Dimensi Transparansi pengelolaan keuangan daerah		
					Nilai Dimensi Penyerapan Anggaran		
					Nilai Dimensi Kondisi Keuangan Daerah		
					Nilai Dimensi Capaian Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel			Persentase kesesuaian pagu KUA PPAS dengan APBD		

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
					Persentase pemenuhan penganggaran mandatory spending		
					Persentase Pemenuhan Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah yang diupload tepat waktu di website resmi Pemda		
					Persentase Penyerapan Anggaran		
					Persentase Perhitungan Rasio keuangan berdasarkan LKPD		
					Opini LKPD		
			Meningkatnya Tata Kelola Anggaran		Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
				<b>Terlaksananya Penyusunan Anggaran Daerah sesuai ketentuan</b>	1. Jumlah Dokumen Hasil 2. Koordinasi Perencanaan 3. Anggaran Pendapatan 4. Jumlah Dokumen KUA dan 5. PPAS yang Disusun 6. Jumlah Dokumen Perubahan 7. KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 8. Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 9. Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 10. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 11. Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 12. Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 13. Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi	<b>Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
					14. Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		
						Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
						Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
						Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
						Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
						Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
						Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	
						Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
			<b>Meningkatnya Capaian Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>		<b>Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	
					<b>Persentase Penurunan SILPA</b>		
				<b>Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</li> <li>2. Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait</li> <li>3. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</li> </ol>	<b>Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	
						Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
						Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	
						Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan		Persentase laporan keuangan tepat waktu	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
				Terlaksananya pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban</li> <li>2. Jumlah Laporan KeuanganSKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</li> <li>3. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban</li> </ol>	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
					<b>Pemerintah Kabupaten/Kota</b> 4. <b>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan</b> 5. <b>Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</b>		
						Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	
						Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	



<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
						Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
						Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
			<b>Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan</b>		<b>Persentase laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Terselesaikannya Pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah 2. Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 3. Terselesaikannya Pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Analisis Investasi Pemerintah Daerah	
						Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	
						Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
			Meningkatnya Tata Kelola Anggaran		Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
				<b>Terselesaikannya dokumen keuangan tahunan yang dihasilkan melalui SIPD</b>	<b>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	
						Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
		<b>Meningkatnya Pengelolaan BMD yang berkualitas dan akuntabel</b>			<b>Nilai Indeks Pengelolaan Aset</b>		
			<b>Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah</b>		<b>Persentase Penambahan Nilai Tetap Aset</b>	<b>Program Pengelola Barang Milik Daerah</b>	
					<b>Persentase laporan keuangan tepat waktu</b>		

				<p><b>Tersajinya Nilai Barang Milik Daerah yang benar dan akurat pada LKPD</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</b></li> <li><b>2. Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b></li> <li><b>3. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun</b></li> <li><b>4. Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah</b></li> <li><b>5. Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</b></li> <li><b>6. Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi</b></li> <li><b>7. Penilaian Barang Milik Daerah</b></li> <li><b>8. Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</b></li> <li><b>9. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</b></li> <li><b>10. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang</b></li> </ol>	<p><b>Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b></p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

					<b>Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</b> 11. <b>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</b> 12. <b>Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah</b>		
--	--	--	--	--	---	--	--

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
						Penyusunan Standar Harga	
						Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
						Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah	
						Inventarisasi Barang Milik Daerah	
						Pengamanan Barang Milik Daerah	
						Penilaian Barang Milik Daerah	
						Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
						Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
						Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
						Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
						Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
		<b>Meningkat nya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)</b>		
			<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah</b>		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</b>	<b>Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 3. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 5. Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	



<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>2. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</li> <li>3. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</li> <li>4. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan</li> <li>5. Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</li> <li>6. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan</li> <li>7. Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD</li> </ol>	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terwujudnya pengelolaan barang daerah yang tertib, efisien, efektif, akuntabel, dan transparan.	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
				Terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang tertib, efisien, efektif, akuntabel, dan transparan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah</li> <li>2. Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah</li> </ol>	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
						Pengolahan Data Retribusi Daerah	
						Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terwujudnya profesionalisme aparatur perangkat daerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</li> <li>2. Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</li> </ol>	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terwujudnya layanan umum perkantoran perangkat daerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</li> <li>2. Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> <li>3. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</li> <li>4. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</li> <li>5. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</li> </ol>	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
				Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	1. Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terwujudnya operasional umum perangkat daerah.	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				<p>Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar berfungsi optimal.</p>	<p>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</p> <p>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</p> <p>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</p> <p>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</p>	<p>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 14. Rencana Program/kegiatan/sub Kegiatan Dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN				126.985.4 77.000,00		132.719.74 9.000,00		145.407.5 15.600,00		159.341.68 8.800,00		166.646.81 8.875,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				32.310.195.571,00		38.665.570.100,00		42.486.227.000,00		45.959.299.000,00		48.125.500.000,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah													5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77.5	73	32.310.195.571,00	73.5	38.665.570.100,00	74	42.486.227.000,00	74.5	45.959.299.000,00	75	48.125.500.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
													5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran,				290.600.591,00		345.500.000,00		390.000.000,00		425.000.000,00		460.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	75	71	26.292.15 0,00	0	-	0	-	0	-	0	-	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	75	71	27.769.35 0,00	0	-	0	-	0	-	0	-	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	27.507.38 0,00	6	100.500.00 0,00	6	115.000.0 00,00	6	122.500.00 0,00	6	130.000.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	4	7	169.802.9 36,00	7	245.000.00 0,00	7	275.000.0 00,00	7	302.500.00 0,00	7	330.000.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
	Perangkat Daerah												- BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	39.228.775,00	0	-	0	-	0	-	0	-	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				27.507.380,00		100.500.000,00		115.000.000,00		122.500.000,00		130.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	27.507.380,00	6	100.500.000,00	6	115.000.000,00	6	122.500.000,00	6	130.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.01.0002 - Koordinasi				27.769.350,00		-		-		-		-	5.02.0.00.0.00.01.0000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													- BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	75	71	27.769.35 0,00	0	-	0	-	0	-	0	-	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				26.292.15 0,00		-		-		-		-	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	75	71	26.292.15 0,00	0	-	0	-	0	-	0	-	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi				39.228.77 5,00		-		-		-		-	5.02.0.00.0.00.01.0000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													- BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	39.228.775,00	0	-	0	-	0	-	0	-	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				169.802.936,00		245.000.000,00		275.000.000,00		302.500.000,00		330.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	7	169.802.936,00	7	245.000.000,00	7	275.000.000,00	7	302.500.000,00	7	330.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				23.420.58 8.870,00		29.722.500 .000,00		32.745.00 0.000,00		35.275.000 .000,00		37.800.000 .000,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel.	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	-	12	222.500.00 0,00	12	245.000.0 00,00	12	275.000.00 0,00	12	300.000.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	12	12	60.416.08 0,00	0	-	0	-	0	-	0	-	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	5	22.256.82 5,00	0	-	0	-	0	-	0	-	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61	1498	23.287.731.000,00	1498	29.500.000.000,00	1498	32.500.000.000,00	1498	35.000.000.000,00	1498	37.500.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36	18	19.249.265,00	0	-	0	-	0	-	0	-	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7	7	30.935.700,00	0	-	0	-	0	-	0	-	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				23.287.731.000,00		29.500.000.000,00		32.500.000.000,00		35.000.000.000,00		37.500.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
													DAN ASET DAERAH	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61	1498	23.287.731.000,00	1498	29.500.000.000,00	1498	32.500.000.000,00	1498	35.000.000.000,00	1498	37.500.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				30.935.700,00		-		-		-		-	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7	7	30.935.700,00	0	-	0	-	0	-	0	-	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				60.416.080,00		-		-		-			5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	60.416.080,00	0	-	0	-	0	-	0	-	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				-		222.500.000,00		245.000.000,00		275.000.000,00		300.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	-	12	222.500.000,00	12	245.000.000,00	12	275.000.000,00	12	300.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				22.256.825,00		-		-		-		-	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	5	5	22.256.825,00	0	-	0		0	-	0	-	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				19.249.265,00		-				-		-	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36	18	19.249.265,00	0	-	0	-	0	-	0	-	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik				20.100.000,00		-		-		-		-	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
Daerah pada Perangkat Daerah													KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terwujudnya Pegelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	20.100.00 0,00	0	-	0	-	0	-	0	-	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.03.000 1 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				20.100.00 0,00		-							5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	20.100.00 0,00	0	-	0	-	0	-	0	-	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				61.184.98 0,00		-		-		-		-	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
Terwujudnya pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	245	1	25.582.97 0,00	0	-	0	-	0	-	0	-	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	35.602.01 0,00	0	-	0	-	0	-	0	-	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.04.000 5 - Pengolahan Data Retribusi Daerah				25.582.97 0,00		-		-		-		-	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	245	1	25.582.97 0,00	0	-	0	-	0	-	0	-	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.04.000 7 - Pelaporan				35.602.01 0,00		-		-		-		-	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
Pengelolaan Retribusi Daerah													KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	35.602.010,00	0	-	0	-	0	-	0	-	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				781.720.000,00		870.000.000,00		950.000.000,00		1.050.000.000,00		1.100.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terwujudnya profesionalisme aparatur perangkat daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35	35	620.000.000,00	35	700.000.000,00	35	750.000.000,00	35	825.000.000,00	35	850.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	3	161.720.000,00	3	170.000.000,00	3	200.000.000,00	3	225.000.000,00	3	250.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				161.720.000,00		170.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	3	161.720.000,00	3	170.000.000,00	3	200.000.000,00	3	225.000.000,00	3	250.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan	35	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan												KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				620.000.000,00		700.000.000,00		750.000.000,00		825.000.000,00		850.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35	35	620.000.000,00	35	700.000.000,00	35	750.000.000,00	35	825.000.000,00	35	850.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.065.548.665,00		3.943.000.000,00		4.287.500.000,00		4.695.000.000,00		4.072.500.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terwujudnya layanan umum perkantoran perangkat daerah.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	7	737.921.016,00	7	845.000.000,00	7	927.500.000,00	7	1.030.000.000,00	7	1.132.500.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
													DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	6650	6650	543.225.0 00,00	6650	48.000.000 ,00	6650	50.000.00 0,00	6650	55.000.000 ,00	6650	60.000.000 ,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	293.715.0 00,00	1	325.000.00 0,00	1	360.000.0 00,00	1	395.000.00 0,00	1	400.000.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	102.840.0 00,00	1	115.000.00 0,00	1	125.000.0 00,00	1	135.000.00 0,00	1	145.000.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	80	935.530.8 74,00	1	950.000.00 0,00	1	1.050.000. 000,00	1	1.135.000. 000,00	1	125.000.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	71.744.40 0,00	1	80.000.000 ,00	1	90.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	1	110.000.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	69.727.87 5,00	1	80.000.000 ,00	1	85.000.00 0,00	1	95.000.000 ,00	1	100.000.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	1.310.844. 500,00	4	1.500.000. 000,00	4	1.600.000. 000,00	4	1.750.000. 000,00	4	2.000.000. 000,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.06.000 1 - Penyediaan Komponen Instalasi				69.727.87 5,00		80.000.000 ,00		85.000.00 0,00		95.000.000 ,00		100.000.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
Listrik/Penerang an Bangunan Kantor													DAN ASET DAERAH	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	69.727.87 5,00	1	80.000.000 ,00	1	85.000.00 0,00	1	95.000.000 ,00	1	100.000.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.06.000 2 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.310.844. 500,00		1.500.000. 000,00		1.600.000. 000,00		1.750.000. 000,00		2.000.000. 000,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	1.310.844. 500,00	4	1.500.000. 000,00	4	1.600.000. 000,00	4	1.750.000. 000,00	4	2.000.000. 000,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.06.000 3 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		-		-		-		-	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				737.921.016,00		845.000.000,00		927.500.000,00		1.030.000.000,00		1.132.500.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	7	737.921.016,00	7	845.000.000,00	7	927.500.000,00	7	1.030.000.000,00	7	1.132.500.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				71.744.400,00		80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	71.744.400,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
													DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.06.000 6 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				543.225.0 00,00		48.000.000 ,00		50.000.00 0,00		55.000.000 ,00		60.000.000 ,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	6650	6650	543.225.0 00,00	6650	48.000.000 ,00	6650	50.000.00 0,00	6650	55.000.000 ,00	6650	60.000.000 ,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.06.000 8 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				102.840.0 00,00		115.000.00 0,00		125.000.0 00,00		135.000.00 0,00		145.000.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	102.840.0 00,00		115.000.00 0,00	1	125.000.0 00,00	1	135.000.00 0,00	1	145.000.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
5.02.01.2.06.000 9 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				935.530.8 74,00		950.000.00 0,00		1.050.000. 000,00		1.135.000. 000,00		125.000.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	80	935.530.8 74,00	1	950.000.00 0,00	1	1.050.000. 000,00	1	1.135.000. 000,00	1	125.000.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.06.001 0 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				293.715.0 00,00		325.000.00 0,00		360.000.0 00,00		395.000.00 0,00		400.000.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	293.715.0 00,00	1	325.000.00 0,00	1	360.000.0 00,00	1	395.000.00 0,00	1	400.000.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang				909.140.0 00,00		738.000.00 0,00		768. 000. 000, 00		793.000.00 0,00		818.000.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
Urusan Pemerintah Daerah													DAN ASET DAERAH	
Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	39	39	241.755.000,00	39	270.000.000,00	39	300.000.000,00	39	325.000.000,00	39	350.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	10	667.385.000,00	5	468.000.000,00	5	468.000.000,00	5	468.000.000,00	5	468.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				667.385.000,00		468.000.000,00		468.000.000,00		468.000.000,00		468.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	10	667.385.000,00	5	468.000.000,00	5	468.000.000,00	5	468.000.000,00	5	468.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				241.755.000,00		270.000.000,00		300.000.000,00		325.000.000,00		350.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	39	39	241.755.000,00	39	270.000.000,00	39	300.000.000,00	39	325.000.000,00	39	350.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				728.280.415,00		805.000.000,00		890.000.000,00		990.000.000,00		1.025.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terwujudnya operasional	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	3	3	156.786.000,00	3	175.000.000,00	3	190.000.000,00	3	215.000.000,00	3	225.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
umum perangkat daerah	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan												- BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	6	571.494.415,00	6	630.000.000,00	6	700.000.000,00	6	775.000.000,00	6	800.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				156.786.000,00		175.000.000,00		190.000.000,00		215.000.000,00		225.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	156.786.000,00	3	175.000.000,00	3	190.000.000,00	3	215.000.000,00	3	225.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				571.494.415,00		630.000.000,00		700.000.000,00		775.000.000,00		800.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	6	571.494.415,00	6	630.000.000,00	6	700.000.000,00	6	775.000.000,00	6	800.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.033.032.050,00		2.241.570.100,00		2.455.727.000,00		2.731.299.000,00		2.850.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar berfungsi optimal.	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	400.000.000,00	1	440.000.000,00	1	484.000.000,00	1	532.400.000,00	1	550.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	28	995.241.050,00	28	1.100.000.000,00	28	1.200.000.000,00	28	1.350.000.000,00	28	1.400.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	207	207	287.791.000,00	207	316.570.100,00	207	348.227.000,00	207	383.049.000,00	207	400.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	350.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	-	1	385.000.000,00	1	423.500.000,00	1	465.850.000,00	1	500.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
5.02.01.2.09.000 2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				995.241.0 50,00		1.100.000. 000,00		1.200.000. 000,00		1.350.000. 000,00		1.400.000. 000,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	28	995.241.0 50,00	28	1.100.000. 000,00	28	1.200.000. 000,00	28	1.350.000. 000,00	28	1.400.000. 000,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.09.000 6 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				287.791.0 00,00		316.570.10 0,00		348.227.0 00,00		383.049.00 0,00		400.000.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya Pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan	207	207	287.791.0 00,00	207	316.570.10 0,00	207	348.227.0 00,00	207	383.049.00 0,00	207	400.000.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
Peralatan dan Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Dipelihara												- BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.09.000 8 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud													5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.09.000 9 - Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				400.000.0 00,00		440.000.00 0,00		484.000.0 00,00		532.400.00 0,00		550.000.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	1	1	400.000.0 00,00	1	440.000.00 0,00	1	484.000.0 00,00	1	532.400.00 0,00	1	550.000.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
5.02.01.2.09.001 0 - Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				350.000.0 00,00		-		-		-		-	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	1	1	350.000.0 00,00	0	-	0	-	0	-	0	-	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.09.001 1 - Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						385.000.00 0,00		423.500.0 00,00		465.850.00 0,00		500.000.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung		0	-	1	385.000.00 0,00	1	423.500.0 00,00	1	465.850.00 0,00	1	500.000.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU				
Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas												KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				26.323.74 5.094,00		29.659.483 .900,00		32.851.59 3.600,00		35.637.694 .800,00		38.016.623 .875,00				
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran, Perbendaharaan, Serta Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	90.25	90.25	26.323.74 5.094,00	90.25	29.659.483 .900,00	90.25	32.851.59 3.600,00	90.25	35.637.694 .800,00	90.25	38.016.623 .875,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	40	40				40				40			40	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	100				100				100			100	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				6.145.600. 475,00		7.055.233. 900,00		7.598.368. 600,00		8.172.587. 300,00		8.978.846. 000,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya Penyusunan Anggaran Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2	0	-	2	55.000.000 ,00	2	55.000.00 0,00		55.000.000 ,00	2	55.000.000 ,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4		684.406.1 80,00	4	537.130.00 0,00	4	590.843.0 00,00	4	649.927.30 0,00	4	714.920.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4	4	1.299.946. 755,00	4	1.588.246. 000,00	4	1.747.070. 600,00	4	1.747.075. 000,00	4	1.921.782. 500,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	600	600	586.057.050,00	600	709.500.000,00	600	780.450.000,00	600	858.495.000,00	600	944.344.500,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2	0	-	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2	2	1.903.596.250,00	2	1.837.000.000,00	2	2.020.700.000,00	2	2.222.770.000,00	2	2.445.047.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	2	106.676.325,00	2	129.079.500,00	2	130.000.000,00	2	143.000.000,00	2	157.300.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan	2	2	56.586.070,00	2	68.469.500,00	2	68.500.000,00	2	75.350.000,00	2	82.885.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
	PPAS yang Disusun												DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4	4	617.513.805,00	4	748.000.000,00	4	822.800.000,00	4	905.080.000,00	4	995.588.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	1000	1000	234.820.015,00	1000	163.102.500,00	1000	163.105.000,00	1000	179.500.000,00	1000	197.450.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1500	1500	385.900.000,00	1500	673.335.300,00	1500	673.500.000,00	1500	740.850.000,00	1500	814.935.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1500	1500	270.098.025,00	1500	491.371.100,00	1500	491.400.000,00	1500	540.540.000,00	1500	594.594.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi				106.676.325,00		129.079.500,00		130.000.000,00		143.000.000,00		157.300.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
dan Penyusunan KUA dan PPAS													- BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	2	106.676.3 25,00	2	129.079.50 0,00	2	130.000.0 00,00	2	143.000.00 0,00	2	157.300.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.01.000 2 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				56.586.07 0,00		68.469.500 ,00		68.500.00 0,00		75.350.000 ,00		82.885.000 ,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	2	56.586.07 0,00	2	68.469.500 ,00	2	68.500.00 0,00	2	75.350.000 ,00	2	82.885.000 ,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.01.000 3 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD				270.098.0 25,00		491.371.10 0,00		491.400.0 00,00		540.540.00 0,00		594.594.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
Terlaksananya Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA- SKPD yang Diverifikasi	1500	1500	270.098.0 25,00	1500	491.371.10 0,00	1500	491.400.0 00,00	1500	540.540.00 0,00	1500	594.594.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.01.000 5 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD				234.820.0 15,00		163.102.50 0,00		163.105.0 00,00		179.500.00 0,00		197.450.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1000	1000	234.820.0 15,00	1000	163.102.50 0,00	1000	163.105.0 00,00	1000	179.500.00 0,00	1000	197.450.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.01.000 6 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD				385.900.0 00,00		673.335.30 0,00		673.500.0 00,00		740.850.00 0,00		814.935.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi	1500	1500	385.900.0 00,00	1500	673.335.30 0,00	1500	673.500.0 00,00	1500	740.850.00 0,00	1500	814.935.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
													DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				1.299.946.755,00		1.588.246.000,00		1.747.070.600,00		1.747.075.000,00		1.921.782.500,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4	4	1.299.946.755,00	4	1.588.246.000,00	4	1.747.070.600,00	4	1.747.075.000,00	4	1.921.782.500,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah				684.406.180,00		537.130.000,00		590.843.000,00		649.927.300,00		714.920.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
tentang Penjabaran Perubahan APBD														
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4	4	684.406.180,00	4	537.130.000,00	4	590.843.000,00	4	649.927.300,00	4	714.920.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				617.513.805,00		748.000.000,00		822.800.000,00		905.080.000,00		995.588.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4	4	617.513.805,00	4	748.000.000,00	4	822.800.000,00	4	905.080.000,00	4	995.588.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.01.0010 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1.903.596.250,00		1.837.000.000,00		2.020.700.000,00		2.222.770.000,00		2.445.047.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
													DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2		1.903.596. 250,00	2	1.837.000. 000,00	2	2.020.700. 000,00	2	2.222.770. 000,00	2	2.445.047. 000,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.01.001 1 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				-		55.000.000 ,00		55.000.00 0,00		55.000.000 ,00		55.000.000 ,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2	0	-	2	55.000.000 ,00	2	55.000.00 0,00	2	55.000.000 ,00	2	55.000.000 ,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.01.001 2 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				-		55.000.000 ,00		55.000.00 0,00		55.000.000 ,00		55.000.000 ,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya Koordinasi	Jumlah Dokumen Hasil	2	0	-	2	55.000.000 ,00	2	55.000.00 0,00	2	55.000.000 ,00	2	55.000.000 ,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan												- BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.01.001 3 - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				586.057.0 50,00		709.500.00 0,00		780.450.0 00,00		858.495.00 0,00		944.344.50 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	600	600	586.057.0 50,00	600	709.500.00 0,00	600	780.450.0 00,00	600	858.495.00 0,00	600	944.344.50 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				3.144.423. 800,00		3.580.000. 000,00		3.825.000. 000,00		4.100.000. 000,00		4.200.000. 000,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya penerbitan SP2D dan Laporan realisasi APBD Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	34	34	343.268.8 00,00	34	380.000.00 0,00	34	425.000.0 00,00	34	450.000.00 0,00	34	475.000.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
	Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait													
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	420	420	2.170.207.000,00	420	2.500.000.000,00	420	2.650.000.000,00	420	2.800.000.000,00	420	2.850.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	96	96	630.948.000,00	96	700.000.000,00	96	750.000.000,00	96	850.000.000,00	96	875.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				630.948.000,00		700.000.000,00		750.000.000,00		850.000.000,00		875.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	96	96	630.948.000,00	96	700.000.000,00	96	750.000.000,00	96	850.000.000,00	96	875.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
5.02.02.2.02.000 9 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				343.268.8 00,00		380.000.00 0,00		425.000.0 00,00		450.000.00 0,00		475.000.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	34	34	343.268.8 00,00	34	380.000.00 0,00	34	425.000.0 00,00	34	450.000.00 0,00	34	475.000.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.02.001 1 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				2.170.207. 000,00		2.500.000. 000,00		2.650.000. 000,00		2.800.000. 000,00		2.850.000. 000,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan	420	420	2.170.207. 000,00	420	2.500.000. 000,00	420	2.650.000. 000,00	420	2.800.000. 000,00	420	2.850.000. 000,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota												DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				2.932.908.400,00		3.003.000.000,00		3.153.150.000,00		3.310.807.500,00		3.476.347.875,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawa ban Pemerintah Kabupaten/Kota	150	150	2.298.055.490,00	150	2.415.000.000,00	150	2.535.750.000,00	150	2.662.537.500,00	150	2.795.664.375,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1	1	228.725.955,00	1	241.500.000,00	1	253.575.000,00	1	266.253.750,00	1	279.566.437,50	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,	8	8	203.252.965,00	8	115.500.000,00	8	121.275.000,00	8	127.338.750,00	8	133.705.687,50	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
	Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban												DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	2	202.873.9 90,00	2	231.000.00 0,00	2	242.550.0 00,00	2	254.677.50 0,00	2	267.411.37 5,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.03.000 2 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,				203.252.9 65,00		115.500.00 0,00		121.275.0 00,00		127.338.75 0,00		133.705.68 7,50	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
Pendapatan-LO dan Beban														
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	8	8	203.252.965,00	8	115.500.000,00	8	121.275.000,00	8	127.338.750,00	8	133.705.687,50	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				228.725.955,00		241.500.000,00		253.575.000,00		266.253.750,00		279.566.437,50	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1	1	228.725.955,00	1	241.500.000,00	1	253.575.000,00	1	266.253.750,00	1	279.566.437,50	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
Pemerintah Daerah														
5.02.02.2.03.000 5 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				202.873.9 90,00		231.000.00 0,00		242.550.0 00,00		254.677.50 0,00		267.411.37 5,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah			202.873.9 90,00	2	231.000.00 0,00	2	242.550.0 00,00	2	254.677.50 0,00	2	267.411.37 5,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
tentang Penjabaran Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	tentang Penjabaran Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota													
5.02.02.2.03.001 1 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan  Pertanggungjawa ban Pemerintah Kabupaten/Kota				2.298.055.490,00		2.415.000.000,00		2.535.750.000,00		2.662.537.500,00		2.795.664.375,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawa ban Pemerintah Kabupaten/ Kota	150	150	2.298.055.490,00	150	2.415.000.000,00	150	2.535.750.000,00	150	2.662.537.500,00	150	2.795.664.375,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				12.245.950.324,00		13.440.000.000,00		15.440.000.000,00		16.940.000.000,00		17.940.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
Terselesaikannya Pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1	1	240.000.000,00	1	240.000.000,00	1	240.000.000,00	1	240.000.000,00	1	240.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			12.005.950.324,00	1	13.000.000.000,00	1	15.000.000.000,00	1	16.500.000.000,00	1	17.500.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	0	0	-	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.04.0002 - Analisis Investasi Pemerintah Daerah				240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1	1	240.000.000,00	1	240.000.000,00	1	240.000.000,00	1	240.000.000,00	1	240.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
													DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.04.000 7 - Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi						200.000.00 0,00		200.000.0 00,00		200.000.00 0,00		200.000.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Tersusunnya Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	0	0	-	1	200.000.00 0,00	1	200.000.0 00,00	1	200.000.00 0,00	1	200.000.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.04.000 9 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12.005.95 0.324,00		13.000.000 .000,00		15.000.00 0.000,00		16.500.000 .000,00		17.500.000 .000,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	1	12.005.95 0.324,00	1	13.000.000 .000,00	1	15.000.00 0.000,00	1	16.500.000 .000,00	1	17.500.000 .000,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data				1.854.862. 095,00		2.581.250. 000,00		2.835.075. 000,00		3.114.300. 000,00		3.421.430. 000,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah													- BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terselesaikannya dokumen keuangan tahunan yang dihasilkan melalui SIPD	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1	0	-	1	58.000.000,00	1	58.000.000,00	1	58.000.000,00	1	58.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150	150	1.854.862.095,00	150	2.388.250.000,00	150	2.642.075.000,00	150	2.921.300.000,00	150	3.228.430.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang	2	0	-	2	135.000.000,00	2	135.000.000,00	2	135.000.000,00	2	135.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
	Kuangan Daerah												DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.05.000 1 - Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				-		135.000.00 0,00		135.000.0 00,00		135.000.00 0,00		135.000.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	2	0	-	2	135.000.00 0,00	2	135.000.0 00,00	2	135.000.00 0,00	2	135.000.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.05.000 2 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				-		58.000.000 ,00		58.000.00 0,00		58.000.000 ,00		58.000.000 ,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan	1		-	1	58.000.000 ,00	1	58.000.00 0,00	1	58.000.000 ,00	1	58.000.000 ,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah												DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.05.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				1.854.862.095,00		2.388.250.000,00		2.642.075.000,00		2.921.300.000,00		3.228.430.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150	150	1.854.862.095,00	150	2.388.250.000,00	150	2.642.075.000,00	150	2.921.300.000,00	150	3.228.430.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				68.351.536.335,00		64.394.695.000,00		70.069.695.000,00		77.744.695.000,00		80.504.695.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	3.48	3.75	68.351.53 6.335,00	4.00	64.394.695 .000,00	4.25	70.069.69 5.000,00	4.50	77.744.695 .000,00	4.75	80.504.695 .000,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah				68.351.53 6.335,00		64.394.695 .000,00		70.069.69 5.000,00		77.744.695 .000,00		80.504.695 .000,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Tersajinya Nilai Barang Milik Daerah yang benar dan akurat pada LKPD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	36	1	258.000.0 00,00	1	283.000.00 0,00	1	308.000.0 00,00	1	333.000.00 0,00	1	358.000.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	15	15	1.684.389. 205,00	15	965.000.00 0,00	15	990.000.0 00,00	15	1.015.000. 000,00	15	1.040.000. 000,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	50	50	3.793.717.225,00	50	4.200.000.000,00	50	4.600.000.000,00	50	5.000.000.000,00	50	5.500.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1	1	644.605.000,00	1	669.605.000,00	1	694.605.000,00	1	719.605.000,00	1	744.605.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	1	234.179.480,00	1	250.000.000,00	1	275.000.000,00	1	300.000.000,00	1	310.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2	2	869.600.000,00	2	894.600.000,00	2	919.600.000,00	2	944.600.000,00	2	969.600.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan	1	1	672.952.875,00	1	686.000.000,00	1	711.000.000,00	1	736.000.000,00	1	761.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
	Barang Milik Daerah												DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	2	644.041.900,00	2	657.000.000,00	2	682.000.000,00	2	707.000.000,00	2	732.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50	50	586.000.000,00	50	611.000.000,00	50	636.000.000,00	50	661.000.000,00	50	686.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2	2	945.000.000,00	2	970.000.000,00	2	995.000.000,00	2	1.020.000.000,00	2	1.045.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1	1	380.490.000,00	1	405.490.000,00	1	430.490.000,00	1	455.490.000,00	1	480.490.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3	3	777.998.885,00	3	803.000.000,00	3	828.000.000,00	3	853.000.000,00	3	878.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	11	11	56.860.561.765,00	11	53.000.000.000,00	11	58.000.000.000,00	11	65.000.000.000,00	11	67.000.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga				869.600.000,00		894.600.000,00		919.600.000,00		944.600.000,00		969.600.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2	2	869.600.000,00	2	894.600.000,00	2	919.600.000,00	2	944.600.000,00	2	969.600.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang				672.952.875,00		686.000.000,00		711.000.000,00		736.000.000,00		761.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah													KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	1	672.952.875,00	1	686.000.000,00	1	711.000.000,00	1	736.000.000,00	1	761.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				644.041.900,00		657.000.000,00		682.000.000,00		707.000.000,00		732.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	2	644.041.900,00	2	657.000.000,00	2	682.000.000,00	2	707.000.000,00	2	732.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				234.179.480,00		250.000.000,00		275.000.000,00		300.000.000,00		310.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	1	234.179.480,00	1	250.000.000,00	1	275.000.000,00	1	300.000.000,00	1	310.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah				945.000.000,00		970.000.000,00		995.000.000,00		1.020.000.000,00		1.045.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2	2	945.000.000,00	2	970.000.000,00	2	995.000.000,00	2	1.020.000.000,00	2	1.045.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah				258.000.000,00		283.000.000,00		308.000.000,00		333.000.000,00		358.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	36	1	258.000.000,00	1	283.000.000,00	1	308.000.000,00	1	333.000.000,00	1	358.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
													DAN ASET DAERAH	
5.02.03.2.01.000 7 - Pengamanan Barang Milik Daerah				3.793.717. 225,00		4.200.000. 000,00		4.600.000. 000,00		5.000.000. 000,00		5.500.000. 000,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	50	50	3.793.717. 225,00	50	4.200.000. 000,00	50	4.600.000. 000,00	50	5.000.000. 000,00	50	5.500.000. 000,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.03.2.01.000 8 - Penilaian Barang Milik Daerah				777.998.8 85,00		803.000.00 0,00		828.000.0 00,00		853.000.00 0,00		878.000.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3	3	777.998.8 85,00	3	803.000.00 0,00	3	828.000.0 00,00	3	853.000.00 0,00	3	878.000.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				56.860.561.765,00		53.000.000.000,00		58.000.000.000,00		65.000.000.000,00		67.000.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	11	11	56.860.561.765,00	11	53.000.000.000,00	11	58.000.000.000,00	11	65.000.000.000,00	11	67.000.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1.684.389.205,00		965.000.000,00		990.000.000,00		1.015.000.000,00		1.040.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan	15	15	1.684.389.205,00	15	965.000.000,00	15	990.000.000,00	15	1.015.000.000,00	15	1.040.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah												DAN ASET DAERAH	
5.02.03.2.01.001 1 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				380.490.0 00,00		405.490.00 0,00		430.490.0 00,00		455.490.00 0,00		480.490.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1	1	380.490.0 00,00	1	405.490.00 0,00	1	430.490.0 00,00	1	455.490.00 0,00	1	480.490.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.03.2.01.001 2 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				644.605.0 00,00		669.605.00 0,00		694.605.0 00,00		719.605.00 0,00		744.605.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1	1	644.605.0 00,00	1	669.605.00 0,00	1	694.605.0 00,00	1	719.605.00 0,00	1	744.605.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
													DAN ASET DAERAH	
5.02.03.2.01.001 3 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				586.000.0 00,00		611.000.00 0,00		636.000.0 00,00		661.000.00 0,00		686.000.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50	50	586.000.0 00,00	50	611.000.00 0,00	50	636.000.0 00,00	50	661.000.00 0,00	50	686.000.00 0,00	5.02.0.00.0. 00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

Tabel 15. Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran, Perbendaharaan, serta Akuntansi dan Pelaporan	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
			Analisis Investasi Pemerintah Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Penyusunan Standar Harga	
			Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	
			Pengamanan Barang Milik Daerah	
			Penilaian Barang Milik Daerah	
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	



Tabel 16. Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai Dimensi Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Nilai	13,14	13,15	13,16	13,17	13,18	13,19	
2	Nilai Dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	Nilai	20	20	20	20	20	20	
3	Nilai Dimensi Transparansi pengelolaan keuangan daerah	Nilai	15	15	15	15	15	15	
4	Nilai Dimensi Penyerapan Anggaran	Nilai	15	15	15	15	15	15	
5	Nilai Dimensi Kondisi Keuangan Daerah	Nilai	3,92	3,93	3,94	3,95	3,96	3,97	
6	Nilai Dimensi Capaian Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai	15	15	15	15	15	15	
7	Nilai Indeks Pengelolaan Aset	Nilai	2,6	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7	
8	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	70	73	73,5	74	74,5	75	

Tabel 17. Indikator Kinerja Kunci BKAD Kota Balikpapan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase pemenuhan mandatory spending	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase realisasi belanja terhadap anggaran	%	85	85,5	86	86,5	87	87,5	
3	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

## BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029 disusun dalam rangka penyelarasan atas disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2025 – 2029 sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan dalam rangka keberlanjutan pembangunan di wilayah Kota Balikpapan.

Dokumen RENSTRA ini merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan BKAD Kota Balikpapan. Olehnya itu, dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Renstra ini, perlu dibangun sinergitas dan koordinasi yang baik dan berkala kepada seluruh stakeholder untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di tahun 2025 – 2029 yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian sasaran program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan, sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029.

Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan, Renstra ini merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2025 hingga Tahun 2029;
2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan, masing-masing bidang/unit kerja lingkup BKAD Kota Balikpapan wajib menjadikan dokumen Renstra ini sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan di unit kerja masing-masing tiap tahunnya, sehingga dapat dihasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam dokumen ini;
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan kegiatan, BKAD Kota Balikpapan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan, maupun kesesuaian antara target dan realisasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja dan melaporkannya secara berkala kepada Wali Kota dengan tembusan ke Bappeda Kota Balikpapan setiap tahun;
4. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan renstra secara berkala dengan melibatkan stakeholder dan membuat laporan pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan dan sasaran pembangunan selama periode Tahun 2025 – 2029;
5. BKAD Kota Balikpapan berencana mengusulkan kembali pembentukan UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan. Upaya ini merupakan hal yang sangat mendesak (urgent) karena sampai saat ini secara

kelembagaan belum ada entitas yang khusus melaksanakan operasionalisasi/pelaksanaan perumusan kebijakan pengelolaan BMD secara baik dan profesional. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut BKAD Kota Balikpapan telah memiliki sumberdaya manusia sebagaimana yang dipersyaratkan sesuai hasil dari perhitungan beban kerja / Analisis Beban Kerja.

Berdasarkan Kaidah pelaksanaan ini, diharapkan kepada seluruh bidang/unit kerja lingkup BKAD Kota Balikpapan untuk menjadi bahan perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. Renstra BKAD Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029 ini diharapkan mampu menentukan arah dan kebijakan dalam mengemban sebagian tugas pemerintahan di BKAD Kota Balikpapan. Untuk selanjutnya Renstra BKAD Tahun 2025 – 2029 sebagai acuan dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Tahunan pada tiap-tiap bagian/unit kerja di lingkungan BKAD Kota Balikpapan.

Tidak tertutup kemungkinan Renstra BKAD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 dikemudian hari mengalami penyempurnaan seiring dengan perkembangan dinamis yang ada dalam BKAD Kota Balikpapan.

## Y. BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan pedoman rencana pembangunan jangka menengah di lingkungan Perangkat Daerah yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan strategis penganggaran pendapatan dan belanja kegiatan yang selanjutnya dilaksanakan melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan adalah salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan selaku pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan. Secara umum Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2025 - 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman dalam hal :

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja), dokumen perencanaan tahunan periode masa perencanaan Renstra yang digunakan sebagai dasar penganggaran pendapatan dan belanja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap tahunnya;
2. Pedoman dalam pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diamanahkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Mewujudkan sinergitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah antara Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Pemerintah Kota Balikpapan

#### 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan dalam penyusunan RENSTRA Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;

13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012 – 2032.
14. Peraturan Daerah Nomor        Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
16. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki maksud yaitu tersedianya dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen perencanaan perangkat daerah tersebut dijabarkan dengan berpedoman pada dokumen RPJMD tahun 2025-2029. Hal yang dipedomani pada Renstra Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang pada RPJMD agar terjaminnya keselarasan antar dokumen perencanaan.

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

1. Dokumen Renstra Perangkat daerah sebagai pedoman perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dalam melaksanakan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan bidang urusan pemerintah sebagaimana yang diatur pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
2. Mewujudkan pencapaian Akuntabilitas pada Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah berdasarkan target *outcome* (hasil) dan *output* (keluaran) yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2025-2029 sebagaimana yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Balikpapan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun kerangka sistematika penulisan Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas 4 (Empat) BAB sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.2 Cascading Kinerja
- 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

### **BAB IV RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

- 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

### **BAB V PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Pembagian dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota diatur berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka mewujudkan fokus tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan tersebut, adapun fungsi dari perangkat organisasi sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan kegiatan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai kewenangannya;
3. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
4. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan dan Setoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai kewenangannya;
5. Pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pengendalian operasional di bidang pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
6. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
7. Pelaksanaan penyuluhan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pelaksanaan 9 (Sembilan) fungsi organisasi tersebut, maka dibutuhkan uraian tugas dan fungsi yang diemban pada tiap jabatan susunan organisasi sebagai berikut:

##### **1. KEPALA BADAN**

Kepala Badan memiliki tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi BPPDRD, mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan tugas dan fungsi



- Melaksanakan pengendalian pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah
  - Penyusunan program dan kegiatan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya
  - Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalan potensi Pajak Daerah;
  - Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan dan Setoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya
  - Pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pengendalian operasional di bidang pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalan potensi Pajak Daerah
  - Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalan potensi Pajak Daerah
  - Pelaksanaan penyuluhan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
  - Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- b. Mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja dibawahnya
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya

## 2. SEKRETARIAT

Sekretariat memiliki tugas melaksanakan pengoordinasian Penyusunan Program, Pengelolaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Rumah Tangga Kantor, Perlengkapan, Protokol, Hubungan Masyarakat, Layanan Informasi dan Pengaduan, Pembinaan Pelayanan Publik, Kearsipan, Surat Menyurat serta Evaluasi dan Pelaporan.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Badan.

Sekretariat membawahkan Subbagian yang dipimpin oleh Kepala Subbagian dan bertanggungjawab langsung pada Sekretaris. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

- c. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- f. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. Pengelolaan anggaran Badan dan penerimaan Pajak Daerah;
- h. Pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. Pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- k. Pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- l. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- m. Pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- n. Pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
- o. Pengoordinasian bidang dan UPT;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan.

Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi Subbidang yang dipimpin oleh seorang kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penetapan, pemeriksaan Pajak Daerah selain PBB P2 dan BPHTB;
- c. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan Pajak Daerah;
- d. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan dan pemeriksaan Pajak Daerah;
- e. Pengendalian pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak Daerah serta menghimpun dan mengelola data, objek dan subjek Wajib Pajak Daerah;
- f. Pengendalian pelaksanaan pendataan sumber Pajak Daerah;
- g. Pengendalian pelaksanaan penetapan Pajak Daerah;

- h. Pengendalian pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah;
- i. Pelaksanaan pemeriksaan dan uji kebenaran objek Wajib Pajak Daerah dilapangan terhadap laporan data yang disampaikan Wajib Pajak Daerah;
- j. Pengendalian penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan mendokumentasikan surat perpajakan yang terkait dengan pendataan;
- k. Pengendalian pelaksanaan validasi data sumber pendapatan Pajak Daerah;
- l. Pelaksanaan konfirmasi dan klarifikasi terhadap perubahan data dan/atau ketidaksesuaian data terhadap Objek Pajak Daerah;
- m. Pengendalian pelaksanaan penghitungan dan penetapan nilai objek Pajak Daerah;
- n. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian kesesuaian penetapan Pajak Daerah terhadap objek Pajak Daerah;
- o. Pelaksanaan fasilitasi permasalahan proses pelayanan wajib Pajak Daerah;
- p. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### 4. BIDANG PBB-P2 dan BPHTB

Bidang PBB P2 dan BPHTB, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penetapan, perhitungan, penerbitan ketetapan Pajak yang terutang serta penatausahaan SPPT dan Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran PBB P2 dan ketetapan BPHTB.

Bidang PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

Bidang PBB-P2 dan BPHTB membawahkan Subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang PBB P2 dan BPHTB mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang PBB P2 dan BPHTB;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendataan, perhitungan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB;
- c. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan, penetapan PBB P2 dan BPHTB;
- d. Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan, perhitungan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB;
- e. Pengendalian pelaksanaan pengolahan data subjek dan objek PBB P2 dan BPHTB melalui SPPT serta pemeriksaan lapangan;

- f. Pengendalian penyusunan daftar induk Wajib Pajak PBB P2 dan BPHTB, dan penyampaian surat perpajakan yang berkaitan dengan pendataan;
- g. Pengendalian penilaian objek pajak dan pengumpulan data potensi PBB P2 dan BPHTB;
- h. Pengendalian pelaksanaan perhitungan penetapan nilai PBB P2 dan BPHTB serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketetapan objek PBB P2 dan BPHTB;
- i. Pengendalian pelaksanaan pengelolaan pendistribusian SPPT PBB P2 dan BPHTB, DHKP dan dokumen lainnya;
- j. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan terkait proses pemungutan PBB P2 dan BPHTB;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 5. BIDANG PENAGIHAN DAN PEMBUKUAN

Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Penagihan dan Pembukuan.

Bidang Penagihan dan Pembukuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Bidang Penagihan dan Pembukuan membawahkan Subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Penagihan dan Pembukuan;
- b. Perumusan kebijakan penagihan, layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah serta pembukuan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- c. Pelaksanaan penagihan, layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah serta Pajak Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah sesuai kewenangannya;
- d. Pelaksanaan pembukuan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- e. Pengendalian pelaksanaan pemberian layanan keberatan dan permohonan banding atas materi Pajak Daerah;
- f. Pelaksanaan penyiapan pertimbangan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding/keberatan Pajak Daerah;
- g. Pelaksanaan pengendalian penerimaan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;

- h. Pelaksanaan klasifikasi tunggakan Pajak Daerah;
- i. Pengendalian tunggakan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- j. Pengendalian pelaksanaan penagihan dan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- k. Pengendalian pelaksanaan penerbitan surat tagihan Pajak Daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran;
- l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan penagihan dan pelayanan keberatan Pajak Daerah;
- m. Penghitungan dan penentuan besaran angsuran pembayaran tunggakan Pajak Daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi penerimaan, tunggakan dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan dan layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- o. Pengendalian penyelenggaraan pemindahbukuan atas penerimaan awal Pajak Daerah dan penerimaan akhir akibat terjadinya restitusi;
- p. Pelaksanaan inventarisir permasalahan pelaksanaan kegiatan penagihan dan pelayanan keberatan sebagai bahan pengendalian Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 6. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional membawahkan subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

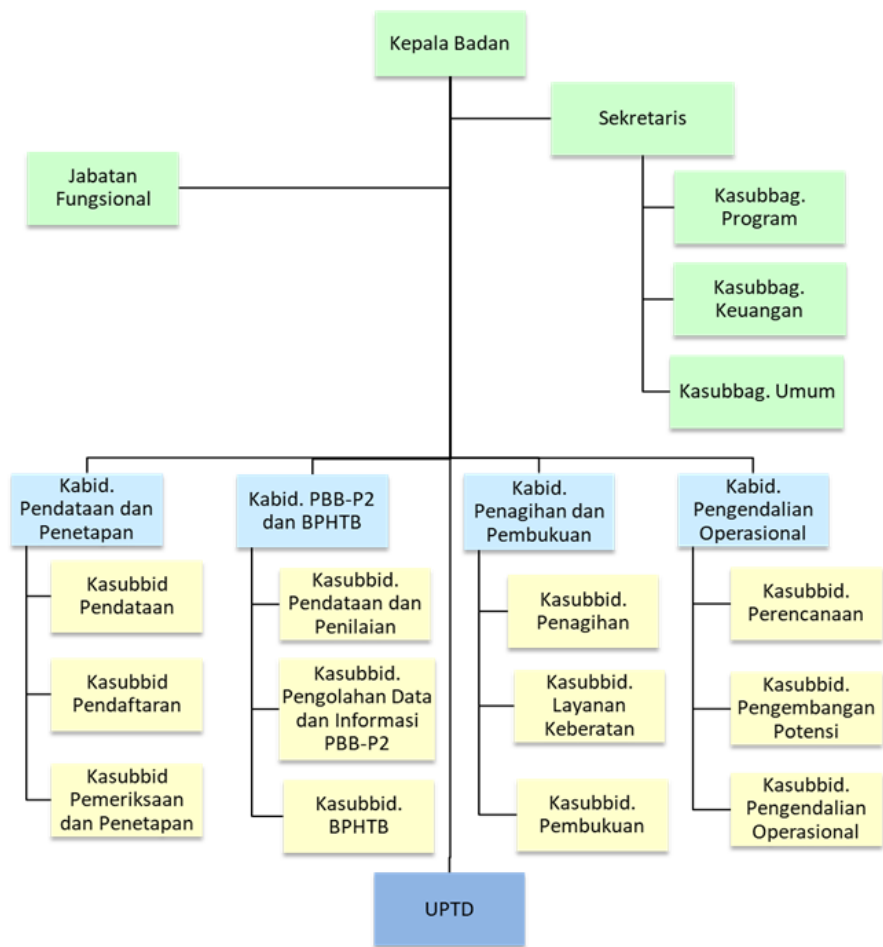
Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
- b. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan potensi dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- c. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan, pengembangan potensi dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Pembinaan pelaksanaan tata kerja dan hubungan kerja serta pembinaan sarana dan prasarana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Pengoordinasian dengan Perangkat Daerah pelaksana pemungutan untuk perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. Pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi permasalahan dalam proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Pelaksanaan pengendalian operasional dan pengawasan internal terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh bidang;
- h. Pelaksanaan pengendalian operasional dan pengawasan terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah;
- i. Penyusunan rencana penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- j. Pelaksanaan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- k. Perencanaan dan pelaksanaan upaya intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- l. Pelaksanaan pengkajian terhadap Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- m. Pengendalian mekanisme pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan, potensi, target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- o. Pengoordinasian perumusan Standar Operasional Prosedur/ Standar Pelayanan di bidang pelayanan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- p. Pengendalian pelaksanaan teknis pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Pada Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah  
Balikpapan



Sumber: data diolah, BPPDRD tahun 2025

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi itu. SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan sebuah institusi atau organisasi.

Tabel 2.1

Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Pria	Wanita
1	PNS	51 orang	21 orang
2	PPPK	19 orang	12 orang
3	NABAN		2 orang

Sumber : data diolah, BPPDRD 2025

Tabel 2.2

Data Pegawai Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	7 orang
2	Golongan III	62 orang
3	Golongan II	33 orang
4	Golongan I	1 orang
5	NABAN	2 orang
Jumlah		105 Orang

Sumber : data diolah, BPPDRD 2025

Tabel 2.3  
Data Pegawai Menurut Pendidikan

No	Status Kepegawaian	Latar Pendidikan (jumlah dalam orang)								
		S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD
1	PNS	5	16	2	14	-	4	31	-	-
2	PPPK	1	14	-	4	-	-	11	-	-
3	NABAN	-	2	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : data diolah, BPPDRD 2025

2.2.2 Aset

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Dalam pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Sehubungan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, selanjutnya pemerintah pusat menetapkan peraturan mengenai pedoman pengelolaan barang milik Negara/Daerah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu dingat bahwa pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian terpisah dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara.

Tabel 2.4  
Inventarisasi Aset pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah  
Kota Balikpapan

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)



NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	BPPDRD	1.119	14.975.441.277
	<b>KOMPUTER</b>	452	5.707484.786
	- Internet	1	14.600.000
	- Komputer Jaringan lainnya	4	24.200.000
	- P.C Unit	61	719,607,000.00
	- Lap Top	20	177,994,000.00
	- Note Book	12	134,160,000.00
	- Personal Komputer lainnya	9	143,499,400.00
	- Scanner (Peralatan Mini Komputer)	32	70,240,500.00
	- Monitor	46	226,312,000.00
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	111	940,344,750.00
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	9	84,920,000.00
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	29	824,347,716.00
	- Server	13	1,043,351,000.00
	- Router	3	10,363,000.00
	- Modem	1	1,000,000.00
	- Switch	2	18,645,000.00
	<b>ALAT ANGKUTAN</b>	70	2,377,790,000.00
	- Station Wagon	12	1,562,286,500.00
	- Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	4	210,000,000.00
	- Sepeda Motor	54	605,503,500.00
	<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>	324	3,051,614,892.00
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	1	1,275,000.00
	- Mesin Hitung Listrik	1	4,250,000.00
	- Mesin Perekam Stensil Folio	1	1,815,000.00
	- Lemari Besi/Metal	55	144,201,800.00
	- Lemari Kayu	5	9,100,000.00
	- Rak Besi	1	14,740,000.00
	- Rak Kayu	3	3,060,000.00
	- Filing Cabinet Besi	1	1,105,000.00
	- Brandkas	1	2,000,000.00
	- Papan Visual/Papan Nama	1	26,675,000.00
	- Alat Penghancur Kertas	4	106,287,500.00
	- Papan Pengumuman	1	8,500,000.00
	- Alat Kantor Lainnya	126	2,123,774,592.00
	- Meja Kerja Kayu	1	29,997,000.00
	- Kursi Besi/Metal	6	14,520,000.00

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	- Meja Rapat	1	18,975,000.00
	- Meja Resepsionis	6	14,125,000.00
	- Meja 1/2 Biro	11	13,500,000.00
	- Kursi Tamu	1	1,000,000.00
	- Kursi Putar	30	51,678,000.00
	- Meja Komputer	19	60,592,500.00
	- Sofa	1	1,275,000.00
	- Meubeler lainnya	10	16,500,000.00
	- Lemari Es	1	1,930,500.00
	- A.C. Window	17	83,453,000.00
	- A.C. Split	4	25,150,000.00
	- Televisi	5	29,425,000.00
	- Sound System	1	108,000,000.00
	- Wireless	2	2,420,000.00
	- Camera film	2	19,210,000.00
	- Handy Cam	2	8,030,000.00
	- Gordyin/Kray	1	102,850,000.00
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1,100,000.00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	1,100,000.00
	<b>ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR</b>	69	1,029,363,250.00
	- Uninterruptible Power Supply (UPS)	40	596,288,000.00
	- Digital LED Running Text	1	14,300,000.00
	- peralatan studio audio lainnya (dst)	21	348,378,250.00
	- Layar Film/Projector	2	57,497,000.00
	- Handy Talky (HT)	4	11,880,000.00
	- Facsimile	1	1,020,000.00

Sumber : SIMDA, 2024

### 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diukur berdasarkan 2 sasaran strategis, yaitu “**Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**”, dan “**Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**”

Tinjauan evaluasi atas kinerja pelayanan Badan Pengelola PAjak Daerah dari Tahun 2022 sampai dengan 2024 dilakukan dengan mengukur capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5 Realisasi dan Capaian Kinerja BPPDRD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	14.34	101 %	12.87	90.6 %	13.49	101 %
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	61.02	93.8 %	65	94.2 %	69,22	97 %

Sumber : LKJIP BPPDRD Tahun 2024

Adapun perbandingan untuk setiiap sasaran strategis dan indicator kinerjanya adalah sebagai berikut :

- a. **Sasaran 1 : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

**Indikator : Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Dengan rumus hitung :

Presentase Peningkatan PAD dari

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah = 
$$\frac{(PDRD\ 2024 - PDRD\ 2023)}{PDRD\ 2023} \times 100\%$$

Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana pada table 3.5 diatas Capaian kinerja Tahun 2022 dan 2024 adalah sama yaitu 101% pada Tahun 2022 sebesar 14.34 atau terealisasi sebesar 101 %, mengalami penurunan dari realisasi maupun tingkat capaiannya pada tahun Tahun 2023 menjadi 12.87 dengan tingkat capaian 90.6% atau menurun 1.47% dari realisasi tahun sebelumnya dan menurun 10,4% dari capaian Tahun 2022 dan mengalami kenaikan pada Tahun 2024 menjadi 13.49 dengan Capaian 101%, meningkat realisasi sejumlah 0.62% capaiannya dari Tahun 2023 dan 10.4% dari Capaian di 2023.

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tercermin pada table berikut :

Tabel 2.6 Perbandingan PAD Tahun 2022, 2023 dan 2024

No.	Uraian	2022	2023	2024	Peningkatan / Penurunan	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	811,249,650,355.18	892,824,394,215.84	977,586,034,227	84,761,640,011.40	9.49
2	Pajak Daerah	623,584,889,978.40	715,889,547,764.50	809,678,437,973	93,788,890,208.50	13.10
3	Retribusi Daerah	40,110,966,976.50	52,196,511,543.82	62,005,985,055	9,809,473,511.18	18.79
4	Pajak dan Retribusi Daerah	663,695,856,954.90	768,086,059,308.32	871,684,423,028	103,598,363,719.68	13.49

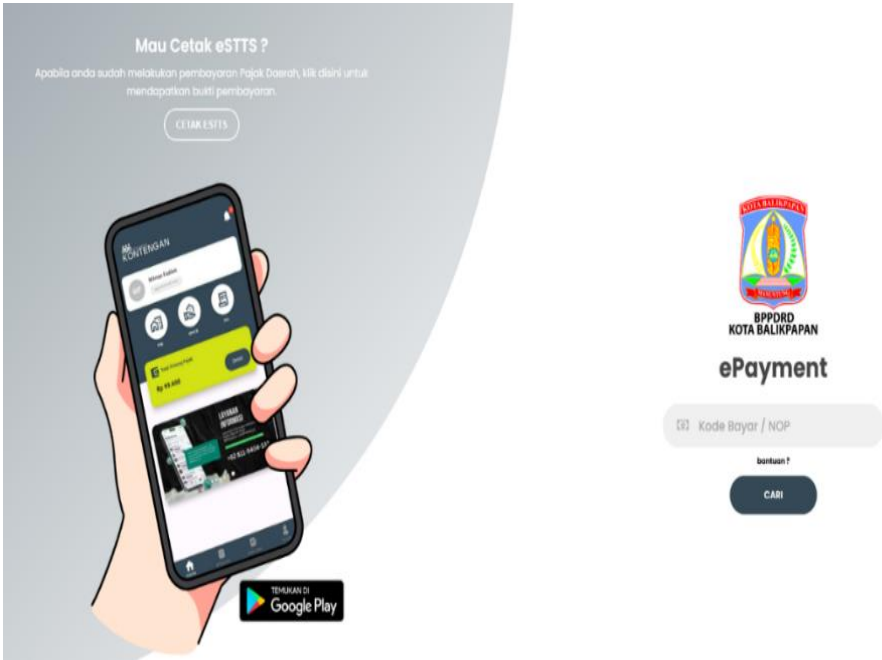
Sumber : Data Diolah, BPPDRD

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam mendukung kinerja Peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik dari Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah, antara lain:

a. Digitalisasi pembayaran Pajak Daerah

Dengan digitalisasi atau elektronifikasi pembayaran pajak daerah memudahkan wajib pajak untuk dapat melakukan pembayaran pajak daerah mereka melalui gadget mereka ataupun melalui merchant2 (indomaret, dll) dan ewallet yang mereka miliki seperti Gojek, QRIS, Go pay, Tokopedia, Sehingga memudahkan wajib pajak untuk bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Gambar 2. 2 Pembayaran Online Pajak Daerah



sumber : website BPPDRD ( [s.id/epayment](https://s.id/epayment))

b. Upaya Penegakan Hukum Pajak Daerah

- Dalam Hal Adanya Tunggakan Pajak Daerah Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran dan melewati tanggal jatuh tempo akan diberikan surat tagihan pajak daerah dan sanksi administrasi
- Memberikan teguran tertulis berupa surat pemanggilan 1 s.d 3 kepada pengusaha yang tidak/belum mendaftarkan sebagai Wajib Pajak;
- Memberikan teguran tertulis kepada wajib pajak yang terdaftar dan belum lapor; dan
- Melakukan pemasangan stiker terhadap wajib pajak yang tidak melapor dan tidak mendaftarkan

Gambar 2.3 Pemasangan stiker untuk Wajib Pajak yang menunggak



Sumber : Instagram BPPDRD

c. Monitoring Objek Pajak Daerah

Monitoring ini dilakukan secara rutin maupun insidental atau acara yang tidak rutin pada saat event tertentu. Upaya ini dilakukan dengan pengawasan Pajak Daerah, output yang diharapkan yaitu jumlah pelaporan Pajak yang dilakukan secara Self Assestment (Pelaporan Mandiri) sesuai dengan keadaan di lapangan, terutama Pajak Hiburan

Gambar 2.4 Monitoring Objek Pajak Hiburan Konser Musik



*Sumber : Instagram BPPDRD*

d. Pemutakhiran Data Pajak Daerah melalui Updating data pajak daerah dan Penyesuaian NJOP PBB-P2

Pemutakhiran ini untuk memisahkan antara Wajib Pajak Daerah yang aktif dan pasif sehingga untuk wajib pajak yang tidak aktif untuk tidak tercantum dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan tahun berikutnya, juga dilakukan Updating data, mengingat validitas data merupakan hal yang penting dalam pencapaian ataupun penentuan target pajak daerah. Selain itu, updating data juga dapat berpengaruh terhadap minat wajib pajak dalam membayar pajak.

Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga melakukan Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak pada beberapa wilayah yang belum sesuai antara data yang ada dengan kondisi di lapangan, misalnya luas bangunan objek pajak dan belum terdapat bangunan sebelumnya,

e. Sosialisasi

Sosialisasi kebijakan-kebijakan terbaru, terutama terkait kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak, dilakukan dengan sosialisasi Langsung dengan Wajib Pajak Daerah atau dengan media Radio, Instagram dan media online lainnya. Dengan tujuan menumbuhkan daya minat wajib pajak dalam menunaikan pajaknya.

Gambar 2.5 Sosialisasi Pajak Daerah





*Sumber : Instagram BPPDRD*

- b. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
Indikator : Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dari segi Realisasi maupun Capaian Kinerja tersebut. Ini terlihat dari table diatas, dimana di tahun 2022 nilainya 61.02 meningkat 3.98 Poin menjadi 65 di Tahun 2023 dan kembali naik di 2024 menjadi 69.22 meningkat 4.22 Poin serta capaiannya di 2022 sebesar 93.8% dan meningkat 0.4 % di Tahun 2023 menjadi 94.2% dan meningkat kembali di tahun 2024 sejumlah 2.8% tingkat capaiannya menjadi 97%. Namun masih belum tercapai dikarenakan dalam 3 tahun terakhir belum mencapai 100%.

Beberapa hal yang menjadi factor penyebab kegagalan tidak tercapainya Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain :

- a. Evaluasi kinerja belum dilakukan secara berkala
- b. Pohon kinerja telah dibuat menyesuaikan dengan IKU namun belum dapat mengidentifikasi kinerja untuk sector lain yang berada dibawahnya (Crosscutting)
- c. Laporan kinerja baru sebagian besar saja yang telah mengungkap informasi tentang pencapaian kinerja, perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan dan realisasi kinerja dari tahun- tahun sebelumnya, serta informasi keberhasilan/kegagalan kinerja dan upaya penyempurnaannya

Adapun upaya yang akan dilakukan kedepannya agar mencapai target yaitu :

1. Melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala
2. Melakukan identifikasi Crosscutting kinerja dari staff sampai ke pimpinan sehingga didapatkan keselarasan dan kesesuaian hingga Indikator dan Target Sasaran Strategis yang akan dicapai Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Memperbaiki laporan kinerja dengan mempertajam isi laporan tersebut

sehingga laporan tersebut dapat mudah dipahami dan dijadikan evaluasi untuk laporan kinerja tahun berikutnya

2.4 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.4.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan khususnya dalam mendukung agenda pembangunan dan menunjang urusan pemerintah daerah di bidang keuangan, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat beberapa permasalahan yang berdampak terhadap pelayanan dan kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Beberapa permasalahan tersebut dapat teridentifikasi berdasarkan karakteristik faktor penyebab yang berasal dari faktor internal dan eksternal organisasi dengan menggunakan analisa S-W-O-T (Strength, Weakness, Opportunities, Threat guna menemukan potensi permasalahan dan isu strategis yang dapat berdampak terhadap kinerja tugas dan fungsi pelayanan. Adapun Analisa SWOT Badan Pengelola Pajak Dearah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan dapat diidentifikasi menurut Gambar 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.7 Analisis S-W-O-T Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

	KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
INTERNAL	<div>1. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang cukup mendukung dalam mencapai target penerimaan pajak daerah</div> <div>2. Tersedianya Sumberdaya manusia yang berpengalaman dan punya komitmen dalam mencapai target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan</div> <div>3. Tersedianya Peraturan Daerah tentang penerimaan pajak daerah yang terbaru.</div>	<div>1. Kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi, sehingga pengelolaan teknologi informasi yang ada saat ini belum bisa dimanfaatkan secara optimal.</div> <div>2. Belum tersedianya Peraturan Walikota terkait petunjuk teknis Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah untuk masing2 pajak Daerah</div> <div>3. Kurangnya sumberdaya manusia (Jabatan fungsional) yang memiliki keahlian khusus penilaian, pemeriksaan, penagihan dan penyitaan Pajak Daerah sehingga pengelolaan dan pengawasan Pajak Daerah belum optimal.</div> <div>4. Administrasi perpajakan yang masih bermasalah seperti data obyek dan subyek pajak yg Kurang tepat , dll.</div> <div>5. Jumlah piutang Pajak Daerah yang terlampau besar</div>
	PELUANG (OPPORTUNITIES)	ANCAMAN (THREATS)



EKSTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi pertumbuhan ekonomi Balikpapan dan Pembangunan IKN yang berdampak terhadap penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah;</li> <li>2. Terlaksananya Kerja Sama antara Pemerintah Bapenda Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan lainnya dalam rangka Pemungutan Pajak Daerah dan Opsern Pajak Daerah;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh dan kurang menyadari kewajibannya membayar pajak</li> <li>2. Masih adanya Wajib pajak yang membayar pajak tidak sesuai ketentuan</li> <li>3. Ketidakpastian kondisi ekonomi yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha wajib pajak</li> </ol>
-----------	---	--

Sumber : Data Diolah, BPPDRD

Identifikasi Permasalahan pada Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersaji pada table berikut ini :

Tabel 2.8 Identifikasi Permasalahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya Kemandirian Fiskal Daerah	1. Belum optimalnya pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	Pemberlakuan regulasi nasional yang berdampak terhadap perubahan skala kewenangan pengelolaan PAD KotaBalikpapan.
		Pembinaan Kerja sama dengan Pemerintah Kab/ Kota belum sepenuhnya terlaksana secara aktif dan terintegrasi khususnya dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah,
	2. Masih kurangnya pengetahuan Wajib Pajak akan kewajiban perpajaknya	Pelayanan operasional yang belum sepenuhnya menjangkau warga Balikpapan
	3. Masih tingginya piutang Pajak Daerah	Diperlukannya optimalisasi pemutakhiran Data Objek Pajak guna mendukung kegiatan Pendataan dan Penagihan
	4. Menurunnya tariff Pajak Daerah, seperti Pajak Hiburan dan Pajak Parkir	Undang-Undang HKPD

Sumber : Data Diolah, BPPDRD

2.4.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Dari Analisi Masalah dan Identifikasi Permasalahan, dapat ditentukan isu strategis yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPDRD), yaitu :

- **Belum Optimalnya Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah**  
Belum maksimalnya Pendataan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Masih kurangnya pengetahuan Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya, Masih tingginya piutang Pajak Daerah, dan menurunnya tarif pajak daerah, seperti pajak hiburan dan paker menjadi pendorong isu strategis ini. Potensi Daerah yang menjadi kewenangan, Permasalahan, Isu KLHS dan ISu Lingkungan yang turut menjadi factor dalam penentuan isu strategis Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tergambar dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.9 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis BPPDRD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Pendapatan Asli Daerah yang besar yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Belum maksimalnya Pendataan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dampak Lingkungan Balikpapan sebagai Kota Penyangga IKN (Ibu Kota Negara)	Ketidakpastian ekonomi global	Tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan	Tata kelola pemerintahan yang baik	Belum Optimalnya Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah
	2. Masih kurangnya pengetahuan Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya					
adanya dukungan undang-undang HKPD terhadap peningkatan PAD	3. Masih tingginya piutang Pajak Daerah		Tata kelola ekonomi global			
	4. menurunnya tarif pajak daerah, seperti pajak hiburan dan parkir					

B A B

3

# TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

*Bab ini berisi tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pada Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

## 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran merupakan perumusan Capaian Strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis dan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja secara keseluruhan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD menjadi salah satu pilar penting untuk mendukung keberlangsungan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah, tujuan dan sasaran BPPDRD ditetapkan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan, khususnya dalam bidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Tujuan tersebut menggambarkan arah jangka menengah yang ingin dicapai, sementara sasaran merupakan hasil nyata yang diharapkan sebagai ukuran

keberhasilan.

Tujuan dan Sasaran tersebut tergambar dalam Tabel 3.1 Sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran BPPDRD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kemampuan Pendapatan Asli Daerah		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)	26,53	30,84	40,77	36,18	36,28	38,57	41,34	
		Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah (%)	13,21	30,09	6,00	6,18	6,35	6,53	6,70	
			Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah (%)	220	4,53	5,00	7,70	10,40	13,10	15,80	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	69,22	73,00	73,14	73,32	74,02	74,68	75,00	

Sumber : Data Diolah, BPPDRD

Berdasarkan tabel diatas bawa Indkator kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Indikator Tujuan

Indikator tujuan pada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah. Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (tax assignment) maupun aspek pengeluaran (expenditure assignment). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (public goods/public service). Desentralisasi fiskal merupakan inti dari desentralisasi itu sendiri karena pemberian kewenangan di bidang politik maupun administrasi tanpa dibarengi dengan desentralisasi fiskal merupakan desentralisasi yang sia-sia, sebab untuk dapat melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab serta tugas-tugas pelayanan publik tanpa diberi wewenang di dalam penerimaan maupun pengeluaran desentralisasi fiskal tidak akan efektif. Dengan demikian, desentralisasi fiskal akan memberi keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi daerah dan memperoleh transfer dari pusat dalam kerangka keseimbangan fiskal. Suatu

daerah otonom diharapkan mampu atau mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang semakin menurun. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah. Untuk meningkatkan kemandirian daerah pemerintah daerah harus berupaya terus menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangan sendiri. Untuk mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu diadakan pengukuran atau penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara kesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah memberi indikasi yang baik bagi kemampuan keuangan daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pembangunan. Berdasarkan penjelasan tersebut Definisi Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah dapat diartikan sebagai ukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah, berdasarkan ukuran tersebut dapat diketahui besaran kemampuan penghimpunan dana yang berasal dari daerah itu sendiri. Untuk mengukur Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$DDF = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

Keterangan :

PAD = Total PAD tahun t, dengan satuan Rp.

TPD = Total Penerimaan Daerah tahun t, dengan satuan Rp.

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah, dengan satuan Persen (%)

**2. Indikator Sasaran**

Indikator sasaran pada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu :

a. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah

Rumus yang digunakan untuk pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah sebagai berikut :

$$((\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun } t - \text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun } t-1) / \text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun } t-1) \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Pajak Daerah} = \frac{(\text{Pajak}_t - \text{Pajak}_{t-1})}{\text{Pajak}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

Pertumbuhan Pajak Daerah = Peningkatan PAD tahun t, dengan satuan Persen (%).

$Pajak_t$  = Total Pajak tahun t, dengan satuan Rp.

$Pajak_{t-1}$  = Total Pajak tahun t-1, dengan satuan Rp.

b. Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah

Rumus yang digunakan untuk pertumbuhan penerimaan Retribusi Daerah sebagai berikut :

$$((\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun } t - \text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun } t-1) / \text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun } t-1) \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Retribusi Daerah} = \frac{(\text{Retribusi}_t - \text{Retribusi}_{t-1})}{\text{Retribusi}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

Pertumbuhan Retribusi Daerah = Peningkatan PAD tahun t, dengan satuan Persen (%).

$\text{Retribusi}_t$  = Total Retribusi tahun t, dengan satuan Rp.

$\text{Retribusi}_{t-1}$  = Total Retribusi tahun t-1, dengan satuan Rp.

c. Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)

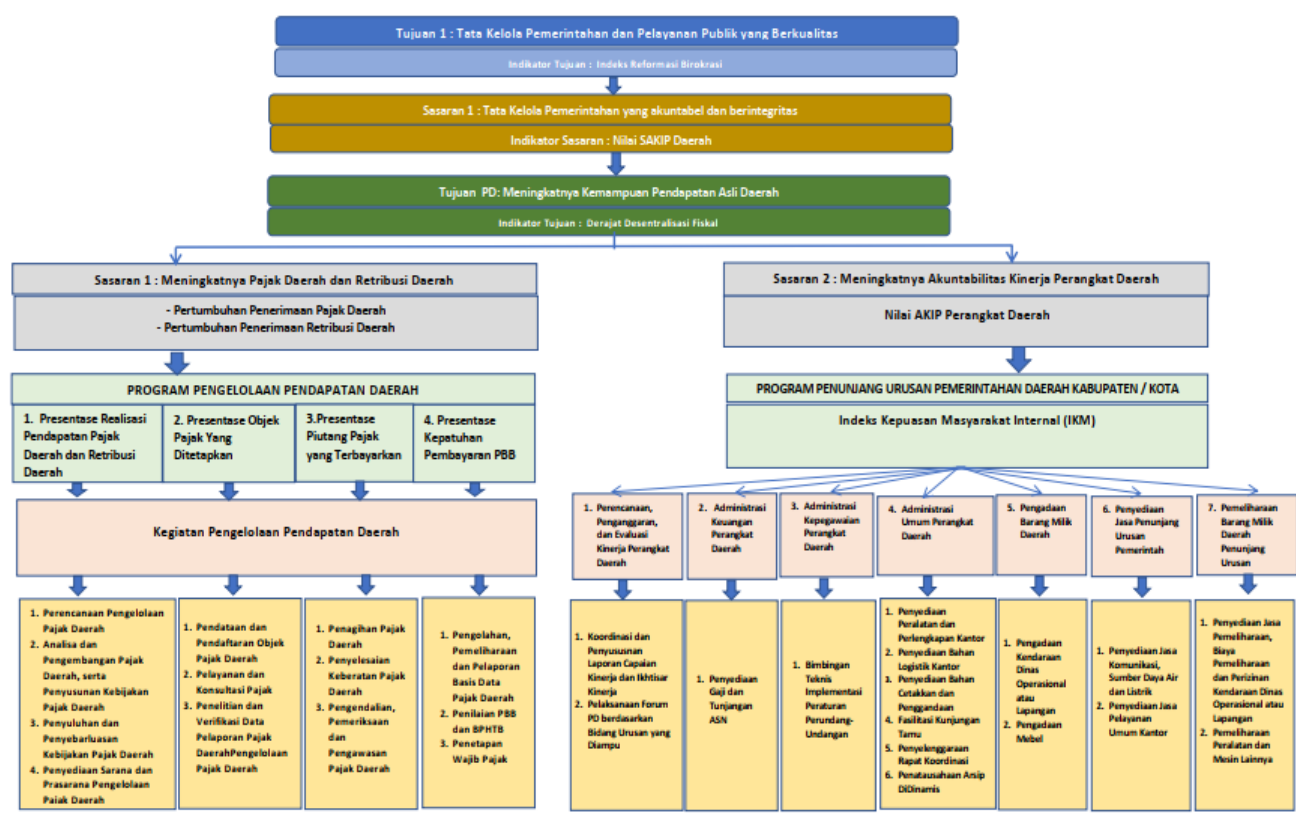
- ✓ Diperoleh dari evaluasi internal yang dilakukan oleh inspektorat daerah (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

3.2 Cascading Kinerja

Cascading kinerja perangkat daerah adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), dan target kinerja dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pegawai paling bawah dalam suatu organisasi

pemerintah. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap level organisasi memiliki tujuan dan indikator yang selaras, sehingga seluruh elemen bekerja menuju pencapaian visi dan misi yang sama. Cascading Kinerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tergambar seperti gambar berikut ini

Gambar 3.1  
Cascading Kinerja BPPDRD



Sumber : Data Diolah, BPPDRD

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan

dan sasaran.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Strategi dan Kebijakan yang akan dituangkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan. Rumusan strategi dan kebijakan yang berpedoman pada strategi dan kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Balikpapan. Adapun strategi dan kebijakan Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan pada tahun 2025-2029 tertuang pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.2 Arah Kebijakan BPPDRD

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Perbaikan tata kelola kelembagaan dan birokrasi	1. Peningkatan kualitas Pendataan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
			2. Peningkatan sosialisasi kebijakan dan penyebaran informasi kepada Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya	
			3. Penurunan piutang Pajak Daerah	
			4. Optimalisasi tarif pajak daerah, seperti pajak hiburan dan parkir	
			5. Peningkatan pengawasandan pembinaan terhadap objek pajak	

Sumber : Data Diolah, BPPDRD

Strategi yang dipergunakan dalam mendukung arah kebijakan tersebut, antara lain :

1. Penguatan Basis Data Pajak dan Retribusi Daerah
  - o Pengembangan sistem informasi pajak dan retribusi yang terintegrasi, akurat, dan mudah diakses.
  - o Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak secara berkala berbasis teknologi informasi dan geospasial.
2. Optimalisasi Pendataan Lapangan
  - o Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur dalam melakukan verifikasi, validasi, dan pendataan objek pajak serta retribusi.
  - o Penerapan metode survei, sensus, dan audit lapangan untuk menjamin keakuratan data.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Digitalisasi
  - o Integrasi data dengan perangkat daerah terkait, instansi vertikal, dan pihak ketiga (seperti BPN, Disdukcapil, dan perbankan).



- Pemanfaatan sistem digital (GIS, e-mapping, e-sensus) untuk memetakan potensi objek pajak dan retribusi.

**B A B**

**4**

# RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

---

*Bab ini berisi Indikator Kinerja Utama (IKU), Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran .*

---

## 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah juga sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam rangka pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan, Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Tabel 4.1 Program Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN					74.390.735.000		76.622.457.000		80.453.580.000		82.452.532.000		84.524.532.000	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					64.647.979.550		64.600.475.398		68.209.777.898		69.213.729.898		71.285.729.898	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	85	85	85,2	64.647.979.550	85,5	64.600.475.398	85,7	68.209.777.898	86	69.213.729.898	86,2	71.285.729.898	BPPDRD
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					9.742.755.450		12.021.981.602		12.243.802.102		13.238.802.102		13.238.802.102	
Meningkatnya ketercapaian target Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (%)	86,07	87,26	87,78	3.625.393.917	88,14	5.671.981.602	88,67	5.148.802.102	89,23	5.398.802.102	89,72	5.398.802.102	BPPDRD
Meningkatnya optimalisasi pendataan objek pajak	Persentase Objek Pajak Yang Ditetapan (%)	88,12	88,36	88,87	984.128.035	89,14	1.050.000.000	89,45	1.200.000.000	89,88	1.350.000.000	90,04	1.350.000.000	BPPDRD
Menurunnya nilai piutang Pajak Daerah	Presentase Piutang Pajak Daerah Yang Terbayarkan (%)	88,72	89,27	89,64	1.321.344.733	90,13	1.350.000.000	90,44	1.550.000.000	90,76	1.750.000.000	91,05	1.750.000.000	BPPDRD
Meningkatnya kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	Presentase Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (%)	53,03	54,24	54,78	3.811.888.765	55,17	3.950.000.000	55,62	4.345.000.000	56,14	4.740.000.000	56,52	4.740.000.000	BPPDRD
TOTAL KESELURUHAN					74.390.735.000		76.622.457.000		80.453.580.000		82.452.532.000		84.524.532.000	

Tabel 4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPPDRD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH							
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kemampuan Pendapatan Asli Daerah				Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)		
		Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah (%)		
					Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah (%)		
		Meningkatnya ketercapaian target Pajak dan Retribusi Daerah			Persentase Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (%)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen )	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan )	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen )	5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan )	5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
				Meningkatnya optimalisasi pendataan objek pajak			Persentase Objek Pajak Yang Ditetapkan (%)
		Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen )	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
					Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
					Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen )	5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
			Menurunnya nilai piutang Pajak Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase Piutang Pajak Daerah Yang Terbayarkan (%)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen )	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen )	5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
			Meningkatnya kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (%)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak )	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak )	5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					IKM Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						5.02.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	



Tabel 4.3 Program dan Pendanaan BPPDRD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN				74.390.735.000		76.622.457.000		80.453.580.000		82.452.532.000		84.524.532.000		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				64.647.979.550		64.600.475.398		68.209.777.898		69.213.729.898		71.285.729.898		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	85	85,2	64.647.979.550	85,5	64.600.475.398	85,7	68.209.777.898	86	69.213.729.898	86,2	71.285.729.898	BPPDRD	
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				149.594.000		170.000.000		180.000.000		195.000.000		205.000.000		
IKM Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	149.594.000	1	170.000.000	1	180.000.000	1	195.000.000	1	205.000.000		
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1		1		1		1		1			
5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan				99.594.000		110.000.000		110.000.000		120.000.000		125.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	99.594.000	1	110.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	125.000.000		
5.02.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.000.000		60.000.000		70.000.000		75.000.000		80.000.000		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000		
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				59.889.497.130		59.333.475.398		62.852.777.898		63.800.729.898		65.800.729.898		
IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70	110	59.889.497.130	110	59.333.475.398	110	62.852.777.898	110	63.800.729.898	110	65.800.729.898		
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				59.889.497.130		59.333.475.398		62.852.777.898		63.800.729.898		65.800.729.898		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70	110	59.889.497.130	110	59.333.475.398	110	62.852.777.898	110	63.800.729.898	110	65.800.729.898		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				300.000.000		300.000.000		315.000.000		320.000.000		325.000.000		
IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	40	50	300.000.000	50	300.000.000	50	315.000.000	50	320.000.000	60	325.000.000		
5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				300.000.000		300.000.000		315.000.000		320.000.000		325.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	40	50	300.000.000	50	300.000.000	50	315.000.000	50	320.000.000	60	325.000.000		
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.330.075.870		2.335.000.000		2.365.000.000		2.380.000.000		2.405.000.000		
IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	2.330.075.870	1	2.335.000.000	1	2.365.000.000	1	2.380.000.000	1	2.405.000.000		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	14		13		13		13		13			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				601.243.070		550.000.000		560.000.000		565.000.000		570.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	14	601.243.070	13	550.000.000	13	560.000.000	13	565.000.000	13	570.000.000		
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				553.911.800		555.000.000		555.000.000		560.000.000		565.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	553.911.800	2	555.000.000	2	555.000.000	2	560.000.000	2	565.000.000		
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				475.000.000		480.000.000		485.000.000		485.000.000		490.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	475.000.000	1	480.000.000	1	485.000.000	1	485.000.000	1	490.000.000		
5.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				99.921.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	2	99.921.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000		
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500.000.000		550.000.000		565.000.000		570.000.000		580.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	500.000.000	1	550.000.000	1	565.000.000	1	570.000.000	1	580.000.000		
5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah				449.650.000		900.000.000		915.000.000		920.000.000		925.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	6	10	449.650.000	10	900.000.000	10	915.000.000	10	920.000.000	10	925.000.000		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6	6		5		5		5		5			
5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				449.650.000		850.000.000		865.000.000		870.000.000		875.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	6	10	449.650.000	10	850.000.000	10	865.000.000	10	870.000.000	10	875.000.000		
5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6	6	0	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				299.257.600		382.000.000		382.000.000		388.000.000		390.000.000		
IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	299.257.600	1	382.000.000	1	382.000.000	1	388.000.000	1	390.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				251.165.000		185.000.000		185.000.000		190.000.000		190.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	1	251.165.000	1	185.000.000	1	185.000.000	1	190.000.000	1	190.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	yang Disediakan (Laporan)													
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				48.092.600		197.000.000		197.000.000		198.000.000		200.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	48.092.600	1	197.000.000	1	197.000.000	1	198.000.000	1	200.000.000		
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.229.904.950		1.180.000.000		1.200.000.000		1.210.000.000		1.235.000.000		
IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	75	75	1.229.904.950	75	1.180.000.000	75	1.200.000.000	75	1.210.000.000	75	1.235.000.000		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	70	70				70		70		70			
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				890.534.950		800.000.000		815.000.000		825.000.000		835.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	75	75	890.534.950	75	800.000.000	75	815.000.000	75	825.000.000	75	835.000.000		
5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				339.370.000		380.000.000		385.000.000		385.000.000		400.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	70	70	339.370.000	70	380.000.000	70	385.000.000	70	385.000.000	70	400.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				9.742.755.450		12.021.981.602		12.243.802.102		13.238.802.102		13.238.802.102		
Meningkatnya kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	Presentase Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (%)	53,03	54,78	3.811.888.765	55,17	3.950.000.000	55,62	4.345.000.000	56,14	4.740.000.000	56,52	4.740.000.000	BPPDRD	
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				9.742.755.450		12.021.981.602		12.243.802.102		13.238.802.102		13.238.802.102		
Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak )	5.190	1	3.811.888.765	1	3.950.000.000	1	4.345.000.000	1	4.740.000.000	1	4.740.000.000		
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	217.401	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				2.001.381.780		2.000.000.000		2.200.000.000		2.400.000.000		2.400.000.000		
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1	1	2.001.381.780	1	2.000.000.000	1	2.200.000.000	1	2.400.000.000	1	2.400.000.000		
5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				1.560.519.785		1.800.000.000		1.980.000.000		2.160.000.000		2.160.000.000		
Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak )	5.190	1	1.560.519.785	1	1.800.000.000	1	1.980.000.000	1	2.160.000.000	1	2.160.000.000		
5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah				249.987.200		150.000.000		165.000.000		180.000.000		180.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	217.401	1	249.987.200	1	150.000.000	1	165.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000		
Meningkatnya ketercapaian target Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (%)	86,07	87,78	3.625.393.917	88,14	5.671.981.602	88,67	5.148.802.102	89,23	5.398.802.102	89,72	5.398.802.102		
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				9.742.755.450		12.021.981.602		12.243.802.102		13.238.802.102		13.238.802.102		
Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan )	8	8	3.625.393.917	8	5.671.981.602	8	5.148.802.102	8	5.398.802.102	8	5.398.802.102		
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen )	11	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	220	240		270		300		320		350			
	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				756.872.000		900.000.000		950.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen )	11	1	756.872.000	1	900.000.000	1	950.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000		
5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				475.800.000		1.000.000.000		326.820.500		326.820.500		326.820.500		
Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak	2	1	475.800.000	1	1.000.000.000	1	326.820.500	1	326.820.500	1	326.820.500		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)													
5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				987.643.213		2.071.981.602		2.071.981.602		2.071.981.602		2.071.981.602		
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan )	8	8	987.643.213	8	2.071.981.602	8	2.071.981.602	8	2.071.981.602	8	2.071.981.602		
5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1.405.078.704		1.700.000.000		1.800.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	220	240	1.405.078.704	270	1.700.000.000	300	1.800.000.000	320	2.000.000.000	350	2.000.000.000		
Meningkatnya optimalisasi pendataan objek pajak	Persentase Objek Pajak Yang Ditetapkan (%)	88,12	88,87	984.128.035	89,14	1.050.000.000	89,45	1.200.000.000	89,88	1.350.000.000	90,04	1.350.000.000		
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				9.742.755.450		12.021.981.602		12.243.802.102		13.238.802.102		13.238.802.102		
Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	1	1	984.128.035	1	1.050.000.000	1	1.200.000.000	1	1.350.000.000	1	1.350.000.000		
	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen )	1	1				1		1					
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	11	11				8		8		8			
5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				400.875.635		400.000.000		450.000.000		500.000.000		500.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	1	1	400.875.635	1	400.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000		
5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				280.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		400.000.000		
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	11	11	280.000.000	8	300.000.000	8	350.000.000	8	400.000.000	8	400.000.000		
5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				303.252.400		350.000.000		400.000.000		450.000.000		450.000.000		
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen )	1	1	303.252.400	1	350.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000		
Menurunnya nilai piutang Pajak Daerah	Presentase Piutang Pajak Daerah Yang Terbayarkan (%)	88,72	89,64	1.321.344.733	90,13	1.350.000.000	90,44	1.550.000.000	90,76	1.750.000.000	91,05	1.750.000.000		
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				9.742.755.450		12.021.981.602		12.243.802.102		13.238.802.102		13.238.802.102		
Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	2	2	1.321.344.733	2	1.350.000.000	2	1.550.000.000	2	1.750.000.000	2	1.750.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen )	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah				464.951.833		400.000.000		450.000.000		500.000.000		500.000.000		
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1	464.951.833	1	400.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000		
5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				100.000.000		100.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				300.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		450.000.000		
Terlaksannnya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen )	2	2	300.000.000	2	350.000.000	2	400.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000		
5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				456.392.900		500.000.000		550.000.000		600.000.000		600.000.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	2	2	456.392.900	2	500.000.000	2	550.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000		

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daeah Kota Balikpapan mempunyai fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan, khususnya dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam menjalankan fungsi tersebut terdapat sub kegitan prioritas dalam mendukung fungsi itu, yaitu :

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas BPPDRD

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Menurunnya nilai piutang Pajak Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Meningkatnya ketercapaian target Pajak dan Retribusi Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Meningkatnya optimalisasi pendataan objek pajak	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Meningkatnya kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Meningkatnya ketercapaian target Pajak dan Retribusi Daerah	5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
		Meningkatnya optimalisasi pendataan objek pajak	5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
		Meningkatnya kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
			5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah	
		Meningkatnya optimalisasi pendataan objek pajak	5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
		Menurunnya nilai piutang Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	

Sumber : Data Diolah, BPPDRD

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan utama yang menunjukkan tingkat pencapaian tujuan strategis organisasi. Dalam konteks Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD), IKU biasanya berkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelayanan wajib pajak, dan kinerja kelembagaan.

Dalam melaksanakan kinerja di bidang Keuangan telah ditetapkan Rumusan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Adapun Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPDRD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	26,53	30,84	40,77	36,18	36,28	38,57	41,34	
2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	69,22	73	73,14	73,32	74,02	74,68	75	
3.	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	%	13,21	30,09	6	6,18	6,35	6,53	6,7	
4.	Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah	%	220	4,53	5	7,7	10,4	13,1	15,8	

Sumber : Data Diolah, BPPDRD

b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan utama yang digunakan untuk menilai sejauh mana pencapaian sasaran strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPPDRD

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	positif	%	26,53	30,84	40,77	36,18	36,28	38,57	41,34	
2.	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	positif	%	13,21	30,09	6,00	6,18	6,35	6,53	6,7	
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	positif	Nilai	69,22	73,00	73,14	73,32	74,02	74,68	75	
4.	Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah	positif	%	220	4,53	5,00	7,7	10,4	13,1	15,8	
5.	Presentase Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	positif	%	53,03	54,24	54,78	55,17	55,62	56,14	56,52	
6.	Presentase Piutang Pajak Daerah Yang Terbayarkan	positif	%	88,72	89,27	89,64	90,13	90,44	90,76	91,05	
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	positif	Nilai	85	85,00	85,20	85,50	85,70	86,00	86,2	
8.	Persentase Objek Pajak Yang Ditetapkan	positif	%	88,12	88,36	88,87	89,14	89,45	89,88	90,04	
9.	Persentase Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	positif	%	86,07	87,26	87,78	88,14	88,67	89,23	89,72	
10.	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	positif	%	0,53	0,54	0,55	0,57	0,58	0,59	0,60	
11.	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	positif	(%)	2,61	2,612	2,614	2,616	2,618	2,62	2,622	

Sumber : Data Diolah, BPPDRD

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan bidang/urusan Pemerintahan untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan Renstra ini disusun dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Balikpapan yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029. Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah terverifikasi dan diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan pada RPJMD.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan ini akan menjadi acuan dalam Penilaian Kinerja. Karena itu, Renstra merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Renja perangkat daerah.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam bentuk Laporan SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan sebagai pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja perangkat dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan target kinerja Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan adalah sebagai pengatur arah perkembangan organisasi dalam meraih keberhasilan di masa mendatang dengan partisipasi dan respon dari semua stakeholdernya. Hal ini merupakan manifestasi dari respon Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan terhadap kondisi lingkungannya baik internal maupun eksternal, yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan pengamatan yang akurat, serta diagnosa lingkungan yang efektif.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini diharapkan mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak-dampak negatif yang akan mengancam kesinambungan operasionalisasi organisasi. Untuk itu semua diperlukan dukungan penuh dari semua stakeholders dan terutama seluruh pegawai Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan. Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan akan dapat tercapai bila didukung oleh seluruh pegawai yang ada dan pihak-pihak yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung.

## Z. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa setiap Perangkat Daerah diharuskan menyusun dokumen Renstra. Lebih lanjut ditekankan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, bahwa Kepala Daerah memerintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra tersebut dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Kota.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 ( lima) tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah disusun dalam beberapa tahapan, yaitu

a. Persiapan penyusunan;

Pada tahapan ini perangkat daerah menyusun rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim Renstra Perangkat Daerah, melaksanakan orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah , menyusun agenda kerja tim dan melakukan penyiapan data dan informasi perencanaan perangkat daerah.

b. Penyusunan rancangan awal;

Penyusunan ranwal renstra dilakukan setelah Bappeda menyampaikan surat edaran Kepala Daerah bersamaan dengan penyusunan ranwal RPJMD. Ranwal renstra memuat pendahuluan, gambaran pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program kegiatan subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan dan penutup. Ranwal renstra disesuaikan dengan hasil forum konsultasi publik RPJMD.

c. Penyusunan rancangan;

Penyusunan rancangan renstra perangkat daerah merupakan proses penyempurnaan ranwal renstra perangkat daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra perangkat daerah.

d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dihadiri oleh



pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Rancangan renstra disempurnakan setelah diverifikasi oleh Bappeda dan berdasarkan berita acara forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah .

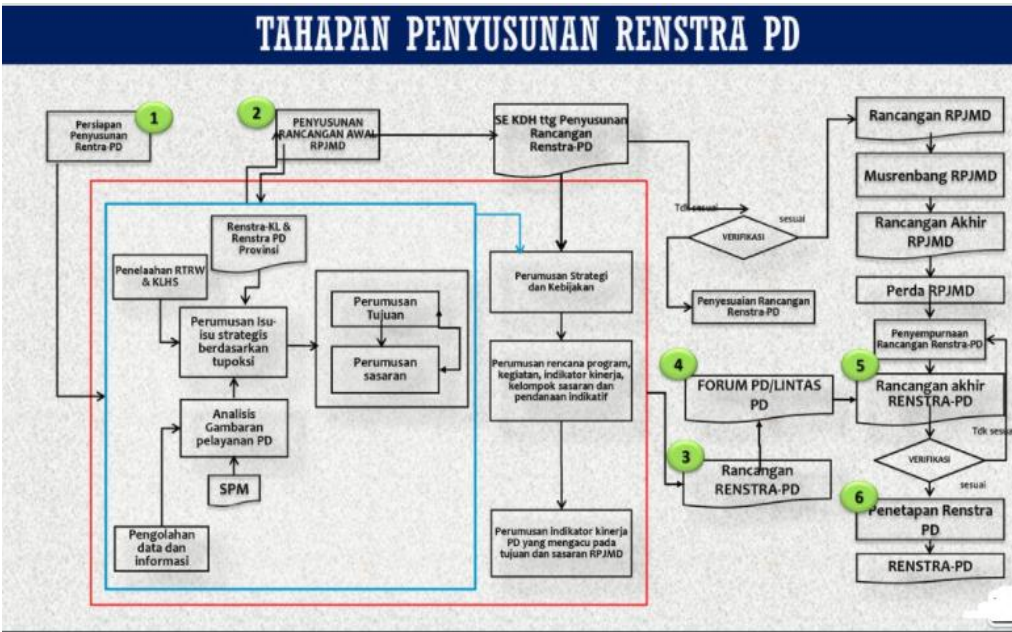
e. Perumusan rancangan akhir; dan

Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan daerah tentang RPJMD. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD.

f. Penetapan.

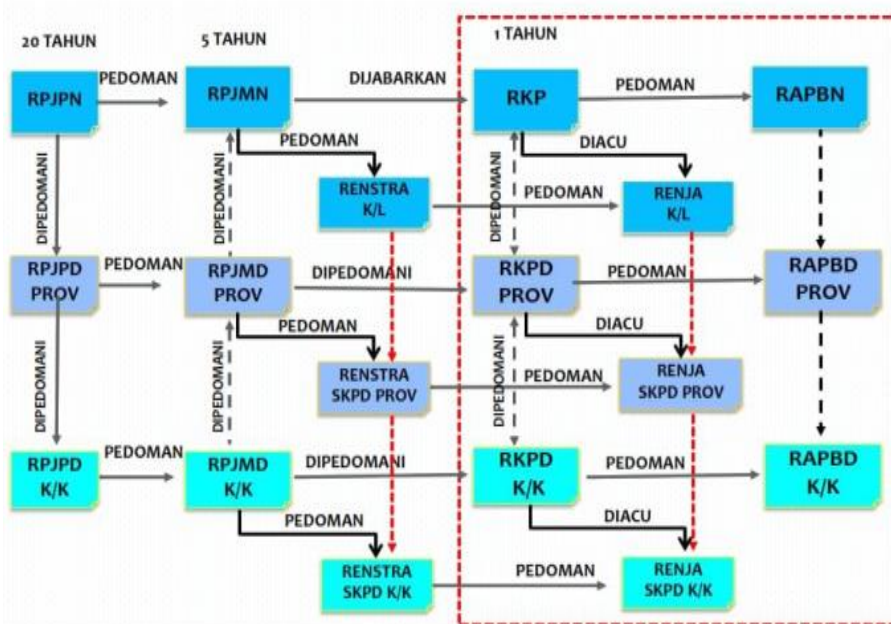
Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan tentang RPJMD ditetapkan. Verifikasi yang dilakukan BAPPEDA harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan ,program, kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra harus selaras dengan peraturan daerah tentang RPJMD.

BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.



**Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota**

Untuk dapat mewujudkan visi misi Kepala Daerah terpilih 2025-2029 , BKPSDM Kota Balikpapan menyusun rankhir renstra Tahun 2025-2029. Rankhir renstra BKPSDM Kota Balikpapan 2025 - 2029 memiliki keterkaitan dengan rankhir RPJMD Kota Balikpapan tahun 2025– 2029, rankhir renstra Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltim 2025 – 2029 , rankhir renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur dan Renja BKPSDM Kota Balikpapan, ilustrasi keterhubungan Renstra tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2. Hubungan Keterkaitan Renstra Dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi Dan Renja Perangkat Daerah**

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari pembuatan rankhir enstra BKPSDM Kota Balikpapan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

- tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045;
  28. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 54);
  29. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2045;
  30. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

### 1.3. **Maksud Dan Tujuan**

Rankhir Renstra BKPSDM Kota Balikpapan disusun dengan maksud sebagai pedoman arah kebijakan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan dalam lingkup Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan dalam kurun waktu 5 tahun mengacu kepada Rankhir RPJMD tahun 2025-2029 Pemerintah Kota Balikpapan.

Tujuan yang ingin dicapai dengan pembuatan Rankhir Renstra BKPSDM Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Balikpapan;
2. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan BKPSDM yang berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
3. Sebagai instrumen monitoring dan evaluasi kinerja BKPSDM Kota Balikpapan.

### 1.4. **Sistematika Penulisan Rankhir Renstra BKPSDM Kota Balikpapan**

Rankhir Renstra BKPSDM Kota Balikpapan ini memberikan penjelasan mengenai target kinerja selama tahun 2025-2029. Sistematika penyajian Rankhir Renstra BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN** Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH** terdiri dari :

- a. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang mengemukakan tentang tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, Sumber daya Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya), kelompok sasaran pelayanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah);
- b. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN** memuat tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah;

**BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN** memuat uraian program, kegiatan, uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator target dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran

Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), target kinerja penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

**BAB V PENUTUP** memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

## BAB II.

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

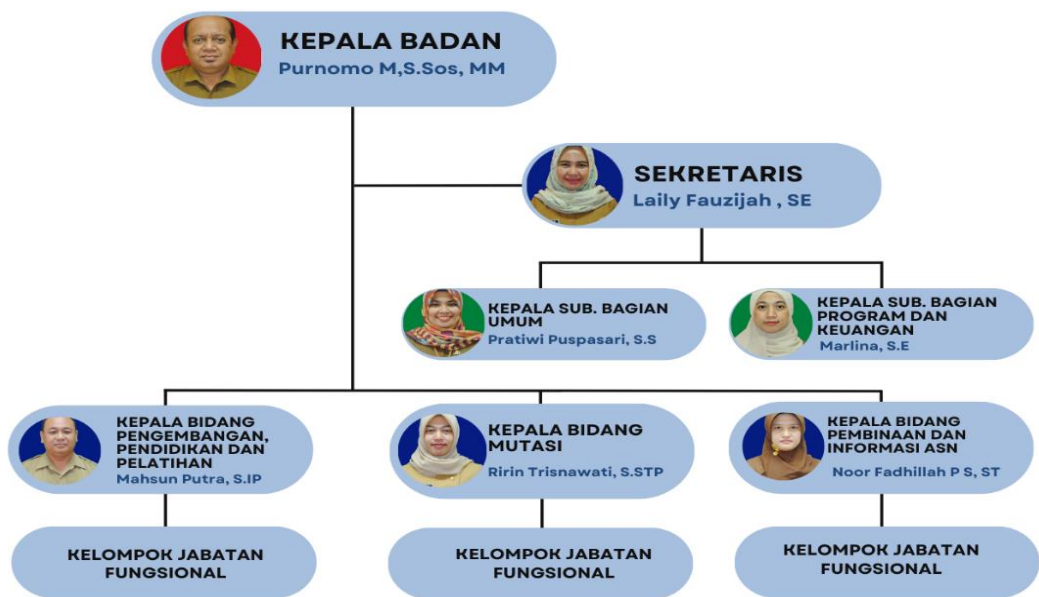
#### 1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur BKPSDM

Dasar pembentukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan adalah Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman di Kota Balikpapan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, BKPSDM Kota Balikpapan mempunyai tugas penunjang urusan pemerintahan dalam lingkup kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, mengamankan BKPSDM Kota Balikpapan untuk melaksanakan fungsi:

1. Perumusan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
2. Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kebijakan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; penyelenggaraan pengadaan, pemberhentiaan dan informasi kepegawaian aparatur sipil negara;
4. Pelaksanaan mutasi dan promosi aparatur sipil negara;
5. pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara;
6. pengelolaan dan pengendalian sistem informasi, data dan dokumen aparatur sipil negara; pelaksanaan fasilitasi kelembagaan profesi aparatur sipil negara;
7. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian manajemen aparatur sipil negara;
8. Penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
9. Penentuan dan pembinaan pola karier aparatur sipil negara;
10. Pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional;
11. Pelaksanaan kesekretariatan Badan;
12. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
13. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan masyarakat, BKPSDM Kota Balikpapan ditunjang dengan susunan organisasi sebagai berikut:



Gambar 3. Struktur Organisasi BKPSDM Kota Balikpapan  
Sumber : SIMPEG BKPSDM Kota Balikpapan

1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rankhir Renstra BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran. Adapun penjelasan terkait sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

12.2.1 Sumber Daya Manusia

BKPSDM Kota Balikpapan saat ini berkedudukan dan menempati kantor dengan alamat Jl. Jenderal Sudirman, Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76112.

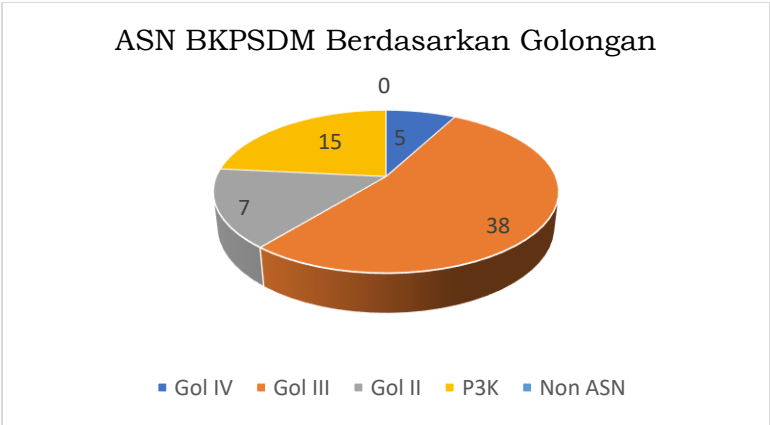
Pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM Kota Balikpapan didukung oleh sumber daya aparatur yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 64 orang. ASN BKPSDM terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 49 (empat puluh enam) orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 15 (lima belas) orang. Berikut rincian pegawai BKPSDM Kota Balikpapan:

Tabel 1. Rincian Pegawai BKPSDM Kota Balikpapan Berdasarkan Jabatan Dan Golongan

No	Uraian	Gol I	Gol II	Gol III	Gol. IV	P3K	Non ASN	Jumlah
1.	Kepala Dinas	0	0	0	1	0	0	1
2.	Sekretaris	0	0	0	1	0	0	1
3.	Kepala Bidang	0	0	2	1	0	0	3
4.	Kepala Sub Bagian	0	0	2	0	0	0	2
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	0	0	18	1	13	0	32
6.	Pelaksana	0	7	16	0	2	0	25
					TOTAL			64

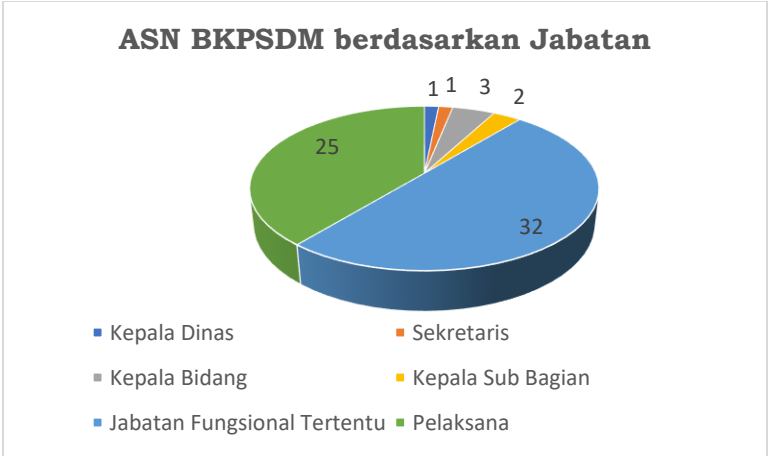
Sumber : SIMPEG BKPSDM Kota Balikpapan





Gambar 4. ASN BKPSDM berdasarkan golongan

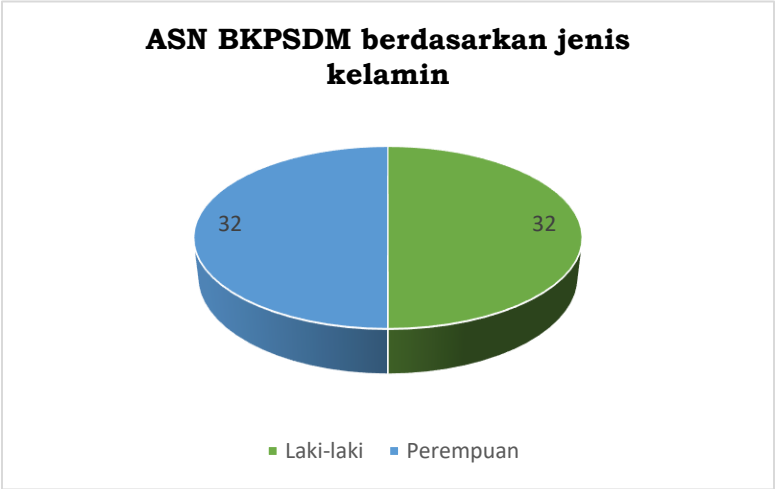
Sumber : SIMPEG BKPSDM Kota Balikpapan



Gambar 5. ASN BKPSDM berdasarkan jabatan

Sumber : SIMPEG BKPSDM Kota Balikpapan

Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat dilihat bahwa jumlah ASN BKPSDM terbanyak ada pada ASN golongan III, sedangkan jumlah terbanyak berdasarkan jabatan ada pada jabatan fungsional tertentu.



Gambar 6. ASN BKPSDM berdasarkan jenis kelamin

Sumber : SIMPEG BKPSDM Kota Balikpapan

Berdasarkan tabel diatas, jika dikaitkan dengan isu pengarusutamaan *gender* maka perbandingan jumlah ASN laki-laki dan perempuan setara.



22.2.1 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BKPSDM menggunakan sumber daya aset /modal yang dimiliki. Adapun rincian aset yang dimiliki oleh BKPSDM adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Sumber Daya Sarana Prasarana (Aset) BKPSDM Kota Balikpapan

N o.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tah un Pem - beli an	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	8
1	02.02.01.0 1.003	Station Wagon	Toyota / Kijang Super KF 70 SHORT	200 3	Pembe lian	80,000 .00	Kabid Diklat
2	02.02.01.0 1.003	Station Wagon	TOYOTA/KIJANG INNOVAG M/T / MOPEN	201 3	Pembe lian	246,10 0.00	Di kembalikan ke Bag Umum
3	02.02.01.0 1.003	Station Wagon	SUZUKI / ST 150 FUTURA	200 7	Pembe lian	87,600 .00	Kasubag Umum (Subanar)
4	02.02.01.0 2.003	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	TOYOTA / INNOVA	201 5	Pembe lian	304,52 0.00	OPS BKD
5	02.02.01.0 2.003	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	MITSUBISHI L 300 COLT	200 3	Pembe lian	90,000 .00	RB
6	02.02.01.0 4.001	Sepeda Motor	KANZEN / KT 110 TAURUS	200 8	Pembe lian	10,439 .00	Pemegang Parmuji
7	02.02.01.0 4.001	Sepeda Motor	Suzuki / FD 110XCSD	200 4		10,000 .00	Pemegang Pudjiono
8	02.02.01.0 4.001	Sepeda Motor	Suzuki / FD 110 XCSD	200 4	Pembe lian	10,000 .00	Pemegang Romy Rahmatulla h
9	02.02.01.0 4.001	Sepeda Motor	Suzuki / FD 110 XCSD	200 5	Pembe lian	10,000 .00	Pemegang Budi resnadi
10	02.02.01.0 4.001	Sepeda Motor	Suzuki / FD 110 XCSD	200 5	Pembe lian	10,000 .00	Pemegang slamet Riyadi
11	02.02.01.0 4.001	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z	200 9	Pembe lian	7,804. 50	Bidang Kedudukan Hukum Peg.
12	02.02.01.0 4.001	Sepeda Motor	Yamaha / Vega ZR	200 9	Pembe lian	11,550 .00	Pemegang Lukman
13	02.02.01.0 4.001	Sepeda Motor	Suzuki / RC 100 S (TORNADO GX)	200 1	Pembe lian	4,000. 00	Pemegang Katimin
14	02.02.01.0 4.001	Sepeda Motor	Kanzen	200 7	Pembe lian	10,439 .00	RB
15	02.02.01.0 4.001	Sepeda Motor	-	200 5	Pembe lian	4,000. 00	RB
16	02.02.01.0 6.002	Mobil Jenazah	Toyota / Hi Ace Commuter Manual	201 9	Pembe lian	545,50 0.00	Mobil & Karoseri 93,5 jt (Eks Nopol KT 7079 A)

N o.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tah un Pem - beli an	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	8
17	02.03.03.01.064	Memori Programmer	IBM / X3400	2015	Pembe- lian	10,800.00	Pengadaan peralatan jaringan
18	02.03.03.07.010	Scanner (Universal Tester)	Fujitsu / 7260	2015	Pembe- lian	35,000.00	Kegiatan: Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
19	02.05.01.01.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	Olympia Carrina 3 / Olympia	2013	Pembe- lian	8,372.00	
20	02.05.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Express	2006	Pembe- lian	1,500.00	
21	02.05.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Olympia / SM18	2014	Pembe- lian	6,612.50	
22	02.05.01.01.004	Mesin Ketik Listrik	Brother / GX 8250	2014	Pembe- lian	7,030.50	
23	02.05.01.02.012	Mesin Penghitung Uang	Prime Dynamic / Double LCD displays	2015	Pembe- lian	4,850.00	kegiatan Bendahara
24	02.05.01.03.007	Mesin Fotocopy Folio	Fuji Xerox	2015	Pembe- lian	49,500.00	Penunjang kegiatan BKD
25	02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	Avery Office / Double Galls Swing Doors	2020	Pembe- lian	2,500.00	Ruang Assessment
26	02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	INFORMA / 3 (tiga) laci & Brankas	2023	Pembe- lian	4,099.90	Lemari Besi Arsip (Ruang Kasubag Umum)
27	02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	INFORMA / 3 (tiga) laci & Brankas	2023	Pembe- lian	4,099.90	Lemari Besi Arsip (Bidang Diklat & Pengembangan)
28	02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	INFORMA / 3 (tiga) laci & Brankas	2023	Pembe- lian	4,099.90	Lemari Besi Arsip (Bidang Mutasi)
29	02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	INFORMA / 3 (tiga) laci & Brankas	2023	Pembe- lian	4,099.90	Lemari Besi Arsip (Bidang Data & Informasi ASN)
30	02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	INFORMA / High File Swing Door Putih	2023	Pembe- lian	4,099.90	Lemari Besi Arsip (Bidang Diklat & Pengembangan)
31	02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	INFORMA / High File Swing Door Putih	2023	Pembe- lian	4,099.90	Lemari Besi Arsip (Bidang Mutasi)

N o.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tah un Pem - beli an	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	8
3 2	02.05.01.0 4.001	Lemari Besi/Metal	INFORMA / High File Swing Door Putih	202 3	Pembe lian	4,099. 90	Lemari Besi Arsip (Bidang Data & Informasi ASN)
3 3	02.05.01.0 4.001	Lemari Besi/Metal	INFORMA / High File Swing Panel Pintu Kaca Ayun	202 3	Pembe lian	4,099. 90	Lemari Arsip Besi Kaca (Gudang Sekretariat)
3 4	02.05.01.0 4.002	Lemari Kayu	Lokal / Lemari	200 5	Pembe lian	2,400. 00	
3 5	02.05.01.0 4.002	Lemari Kayu	Lokal / Lemari	200 5	Pembe lian	1,766. 67	Rusak berat
3 6	02.05.01.0 4.002	Lemari Kayu	Lokal / Lemari	200 7	Pembe lian	1,650. 00	
3 7	02.05.01.0 4.003	Rak Besi	Fortuna Rack / Wallmount Rack 12U Single Door	201 9	Pembe lian	3,850. 00	Pengadaan Wallmount Rack Assessment
3 8	02.05.01.0 4.003	Rak Besi	Besi Siku	202 0	Pembe lian	11,850 .00	Rak Besi Siku (alas rak multiplek)
3 9	02.05.01.0 4.004	Rak Kayu	Lokal / Lemari	200 7	Pembe lian	2,100. 00	Rak Arsip
4 0	02.05.01.0 4.005	Filing Cabinet Besi	VIP / lemari	200 7	Pembe lian	6,000. 00	
4 1	02.05.01.0 4.005	Filing Cabinet Besi	lion / rak	201 2	Pembe lian	2,420. 00	Dari Perlengkap an & Umum/Rus ak Berat
4 2	02.05.01.0 4.005	Filing Cabinet Besi	Data scrips / CRS S8 Abu- abu/Roll Pack	201 3	Pembe lian	49,628 .00	Lemari Besi Roll Pack untuk arsip pegawai
4 3	02.05.01.0 4.005	Filing Cabinet Besi	Lion / CRS S8 Abu- abu/Roll Pack	201 3	Pembe lian	49,628 .00	Lemari Roll Pack untuk arsip pegawai
4 4	02.05.01.0 4.005	Filing Cabinet Besi	Lion / Kabinet 3 Pintu	201 4	Pembe lian	6,510. 00	
4 5	02.05.01.0 4.005	Filing Cabinet Besi	Lion / Kabinet 4 Pintu	201 4	Pembe lian	10,515 .00	
4 6	02.05.01.0 4.005	Filing Cabinet Besi	Avery Office / Four Drawers Filling Cabinet (Dark Grey)	202 0	Pembe lian	2,000. 00	Sub Bid Kompetensi & Kinerja
4 7	02.05.01.0 4.005	Filing Cabinet Besi	Avery Office / Four Drawers Filling Cabinet (Dark Grey)	202 0	Pembe lian	2,000. 00	Sub Bid Diklat
4 8	02.05.01.0 4.005	Filing Cabinet Besi	Avery Office / Four Drawers Filling Cabinet (Dark Grey)	202 0	Pembe lian	2,000. 00	Sub Bid Data

N o.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tah un Pem - beli an	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	8
49	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	Avery Office / Four Drawers Filling Cabinet (Dark Grey)	2020	Pembe- lian	2,000.00	Sub Bag Umum
50	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	Avery Office / Four Drawers Filling Cabinet (Dark Grey)	2020	Pembe- lian	2,000.00	Sub Bid Diklat
51	02.05.01.04.007	Brandkas	Krisbow / YB 350 ALP (10091298)	2020	Pembe- lian	5,885.00	Sub Bid Diklat
52	02.05.01.04.015	Locker	SAPPORO / Lemari Locker Rak	2023	Pembe- lian	4,151.40	Lemari Locker Assessment Center
53	02.05.01.04.027	Lemari Kaca	Lokal / .	2007	Pembe- lian	1,000.00	
54	02.05.01.04.027	Lemari Kaca	Lokal / .	2007	Pembe- lian	1,000.00	Rusak Berat
55	02.05.01.04.027	Lemari Kaca	Lokal / .	2008	Pembe- lian	500.00	Rusak berat
56	02.05.01.04.027	Lemari Kaca	Lokal / .	2008	Pembe- lian	500.00	Rusak berat
57	02.05.01.04.027	Lemari Kaca	Lokal / .	2008	Pembe- lian	1,200.00	
58	02.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System	Turbo HD / DVR 4CH ADV AHD H264	2016	Pembe- lian	12,150.00	Seluruh ruang BKD
59	02.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System	Linksis / ADV Turbo HD	2017	Pembe- lian	8,450.00	Pengadaan Alat Bantu Keamanan (CCTV)
60	02.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System	Honeywell / HEN 16104 16 Channel	2020	Pembe- lian	49,990.00	CCTV 9 Mata (Ruang Assessor & Lt 1)
61	02.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System	Haneywell / NVR 4 Channel	2020	Pembe- lian	19,990.00	CCTV 4 Mata (Ruang Server)
62	02.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System	HIK VISION / 8 Ch Analog + HDD 2 TB	2023	Pembe- lian	5,328.00	DVR CCTV 8 Ch Analog ( DVR CCTV Lt.V)
63	02.05.01.05.005	White Board	Lokal / Papan Tulis	2007	Pembe- lian	500.00	Rusak berat
64	02.05.01.05.005	White Board	-	2016	Pembe- lian	2,500.00	Sekretariat
65	02.05.01.05.005	White Board	-	2016	Pembe- lian	2,500.00	Pengadaan white board
66	02.05.01.05.005	White Board	-	2016	Pembe- lian	2,500.00	Papan Media (Papan pengumuman)

N o.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tah un Pem - beli an	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	8
67	02.05.01.05.010	Alat Penghancur Kertas	Merlin Yale 3000 SC / 3000	2012	Pembe- lian	9,975.00	
68	02.05.01.05.010	Alat Penghancur Kertas	SECURE / MAXI 15A	2015	Pembe- lian	3,927.00	Kegiatan seleksi penerimaan CPNS
69	02.05.01.05.010	Alat Penghancur Kertas	SECURE / MAXI 15A	2015	Pembe- lian	3,927.00	Kegiatan seleksi penerimaan CPNS
70	02.05.01.05.010	Alat Penghancur Kertas	Expert	2016	Pembe- lian	4,500.00	Diruangan keuangan
71	02.05.01.05.010	Alat Penghancur Kertas	Expert	2016	Pembe- lian	4,500.00	Diruangan Kasubag Perencanaan Program
72	02.05.01.05.010	Alat Penghancur Kertas	Expert	2016	Pembe- lian	4,500.00	Penunjang Bid. Kespeg KH
73	02.05.01.05.010	Alat Penghancur Kertas	Expert	2016	Pembe- lian	4,500.00	Penunjang Bid. Diklat
74	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	Mesin Absensi / Mesin Absensi	2013	Pembe- lian	18,749.50	Mesin Absensi Pegawai BKD Rusak Berat
75	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	Solution / RS232/485	2015	Pembe- lian	20,157.50	Pengadaan Absensi Finger Print dan aplikasi
76	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	Finger Spot Revo / WFV-208BNC	2021	Pembe- lian	5,500.00	Absensi Finger Print (FingerSpot)
77	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	Fingerspot Revo WFV - 208BNC / Vein and Face	2024	Pembe- lian	7,004.10	Absensi Finger Print Spot Pegawai
78	02.05.01.05.023	Overhead Projector	. / .	2007	Pembe- lian	3,500.00	Screen/laya- r proyektor
79	02.05.01.05.024	Hand Metal Detector	Besgard / 1165180	2020	Pembe- lian	1,014.78	Kegiatan CPNS TA 2019
80	02.05.01.05.024	Hand Metal Detector	Besgard / 1165180	2020	Pembe- lian	1,014.78	Kegiatan CPNS TA 2019
81	02.05.01.05.043	LCD Projector/Info- cus	Epson / EB-L200F	2021	Pembe- lian	29,865.00	00001 TPK Assessment
82	02.05.01.05.043	LCD Projector/Info- cus	Epson / EB-L200F	2021	Pembe- lian	29,865.00	00002 Sekretariat
83	02.05.01.05.043	LCD Projector/Info- cus	Epson / EB-L200F	2021	Pembe- lian	29,865.00	00003 Sekretariat
84	02.05.01.05.044	Flip Chart	Flip Chart / Magnetic, Standing Kaki Tiga	2023	Pembe- lian	2,880.00	Flip Chart (Assessmen- t)

N o.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tah un Pem - beli an	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	8
85	02.05.01.05.047	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Sony / Voice Recorder Sony	2021	Pembe- lian	1,457.50	Alat Perekam Suara 00004 (Assessmen- t)
86	02.05.01.05.047	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Sony / Voice Recorder Sony	2021	Pembe- lian	1,457.50	Alat Perekam Suara 00001 (Assessmen- t)
87	02.05.01.05.047	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Sony / Voice Recorder Sony	2021	Pembe- lian	1,457.50	Alat Perekam Suara 00005 (Assessmen- t)
88	02.05.01.05.047	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Sony / Voice Recorder Sony	2021	Pembe- lian	1,457.50	Alat Perekam Suara 00003 (Assessmen- t)
89	02.05.01.05.047	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Sony / Voice Recorder Sony	2021	Pembe- lian	1,457.50	Alat Perekam Suara 00006 (Assessmen- t)
90	02.05.01.05.047	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Sony / Voice Recorder Sony	2021	Pembe- lian	1,457.50	Alat Perekam Suara 00002 (Assessmen- t)
91	02.05.01.05.047	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	SONY / ICD-TX660 16 GB 636h	2022	Pembe- lian	2,164.50	Alat Perekam Suara (Voice Pen) Bidang Mutasi
92	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	Intel Core 15.3 D Ghz	2016	Pembe- lian	94,985.00	Abdate Data Kepegawaia- n
93	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	Krisbow / Hand Truck	2016	Pembe- lian	485.00	Kegiatan angkutan dokumen pegawai
94	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	Kunci Pintu Elektronik	2017	Pembe- lian	13,090.00	Pengadaan Alat Bantu Keamanan
95	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	Portable / Multipleks/ra- ngka 18 mm	2019	Pembe- lian	10,395.00	Meja Lipat Portable
96	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	Krisbow / Rak 3	2020	Pembe- lian	1,500.00	Trolley Barang (3 Rak)
97	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	Raised Floor Server / RC 360 - HPL	2023	Pembe- lian	45,232.50	Raised Floor Server ( Lantai pada

N o.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tah un Pem - beli an	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	8
			Panel Material Steel				ruangan server)
9 8	02.05.02.0 1.001	Meja Kerja Besi/Metal	Besi berlubang serbaguna / Ducco Coating	201 9	Pembe lian	3,465. 00	Rak Arsip 5 susun besi siku
9 9	02.05.02.0 1.002	Meja Kerja Kayu	Masterindo / Meja Printer	202 0	Pembe lian	600.00	Sub Bag Umum
1 0 0	02.05.02.0 1.013	Meja Podium	Lokal / .	201 0	Pembe lian	2,750. 00	Rusak Berat
1 0 1	02.05.02.0 1.024	Meja 1/2 Biro	Lokal / Meja	200 8	Pembe lian	2,400. 00	Rusak Berat
1 0 2	02.05.02.0 1.024	Meja 1/2 Biro	Lokal / Meja	200 9	Pembe lian	11,700 .00	Rusak Berat
1 0 3	02.05.02.0 1.024	Meja 1/2 Biro	Lokal	200 8	Pembe lian	750.00	Rusak Berat
1 0 4	02.05.02.0 1.031	Kursi Tamu	Olimpic	200 8	Pembe lian	1,360. 00	Rusak Berat
1 0 5	02.05.02.0 1.031	Kursi Tamu	Olimpic / Kursi	200 8	Pembe lian	680.00	Rusak Berat
1 0 6	02.05.02.0 1.031	Kursi Tamu	Olimpic / Kursi	200 9	Pembe lian	5,440. 00	Rusak Berat
1 0 7	02.05.02.0 1.032	Kursi Putar	Indachi / Kursi	200 6	Pembe lian	1,600. 00	Rusak Berat
1 0 8	02.05.02.0 1.039	Meja Komputer	Lokal / Meja	200 9	Pembe lian	1,980. 00	Rusak Berat
1 0 9	02.05.02.0 1.039	Meja Komputer	Lokal / Meja	201 0	Pembe lian	990.00	Rusak Berat
1 1 0	02.05.02.0 1.039	Meja Komputer	Multipleks/R angka 18mm / Laci Tarik Keyboard PC, Lubang Kabel PC	201 9	Pembe lian	14,850 .00	Meja Komputer
1 1 1	02.05.02.0 1.048	Sofa	Sofa / Sofa tunggu (1 set 2 unit)	202 4	Pembe lian	5,900. 09	Sofa Ruang Tunggu (Ruang CACT)
1 1 2	02.05.02.0 1.050	Meubeleur lainnya	Ellepen / Mebel	200 8	Pembe lian	250.00	
1 1 3	02.05.02.0 1.050	Meubeleur lainnya	Ellepen / Mebel	200 8	Pembe lian	12,500 .00	RB
1 1 4	02.05.02.0 3.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuu m Cleaner	Elektrolux / 2931	201 4	Pembe lian	2,785. 00	Harga termasuk PPHP



N o.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tah un Pem - beli an	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	8
1 1 5	02.05.02.0 3.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuu m Cleaner	NILFISK / Multi II 22 Inox	202 3	Pembe lian	6,254. 85	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkap an Kantor / Vacum Cleaner
1 1 6	02.05.02.0 4.001	Lemari Es	POLYTRON / mini Refrigerator capacity 50L, Weight 15 Kg	202 4	Pembe lian	2,353. 20	Alat Pendingin (Lemari es Mini)
1 1 7	02.05.02.0 4.003	A.C. Window	changhong	200 6	Pembe lian	3,000. 00	Rusak Berat
1 1 8	02.05.02.0 4.003	A.C. Window	LG	200 8	Pembe lian	3,500. 00	Rusak Berat
1 1 9	02.05.02.0 4.003	A.C. Window	LG 1PK / 09LTG	201 3	Pembe lian	3,950. 00	Diruangan Sekretaris BKD/Rusa k Berat
1 2 0	02.05.02.0 4.004	A.C. Split	Hitachi	200 6	Pembe lian	3,000. 00	Rusak Berat
1 2 1	02.05.02.0 4.004	A.C. Split	LG / 2 PK	201 4	Pembe lian	18,208 .00	Rusak Berat
1 2 2	02.05.02.0 4.004	A.C. Split	LG / 2 PK	201 4	Pembe lian	18,233 .00	
1 2 3	02.05.02.0 4.004	A.C. Split	Daikin / Split BTU/H 18000, 1730W;COP	201 8	Pembe lian	9,827. 00	AC pendingin ruangan server
1 2 4	02.05.02.0 4.004	A.C. Split	DAIKIN / Standars Series R32	202 3	Pembe lian	22,533 .00	AC Split Ruang Server
1 2 5	02.05.02.0 6.002	Televisi	SONY / LED TV	201 5	Pembe lian	11,550 .00	Kegiatan seleksi penerimaan CPNS
1 2 6	02.05.02.0 6.002	Televisi	SONY / LED TV	201 5	Pembe lian	11,550 .00	Kegiatan seleksi penerimaan CPNS
1 2 7	02.05.02.0 6.002	Televisi	SONY / LED TV	201 5	Pembe lian	11,550 .00	Kegiatan seleksi penerimaan CPNS
1 2 8	02.05.02.0 6.002	Televisi	SAMSUNG / 55TU8000 SMART TV 4K	202 0	Pembe lian	9,500. 00	Televisi Umum
1 2 9	02.05.02.0 6.002	Televisi	SAMSUNG / Smart TV LED Crystal 4K UHD UA 85BU8000K	202 3	Pembe lian	44,344 .50	Smart TV LED Samsung (Ruang Rapat Besar)



N o.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tah un Pem - beli an	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	8
130	02.05.02.0 6.008	Sound System	Black Spider / KA 200	201 6	Pembe lian	28,000 .00	Aula ruang rapat besar
131	02.05.02.0 6.008	Sound System	Hardwell / Turbo Voice 15 Pro	202 1	Pembe lian	7,400. 00	Portable Speaker (Hardwell) Sekretariat
132	02.05.02.0 6.013	Megaphone	Megaphone / Siren, Detachable microphone	201 6	Pembe lian	1,100. 00	Penunjang kegiatan BKD
133	02.05.02.0 6.021	Camera Video	LOGITECH / C525	201 6	Pembe lian	1,450. 00	Webcam foto badge
134	02.05.02.0 6.021	Camera Video	LOGITECH / C930e	202 0	Pembe lian	2,585. 00	Webcam dan Tripod (Umum)
135	02.05.02.0 6.021	Camera Video	LOGITECH / Brio Stream Edition 4K Webcam	202 3	Pembe lian	3,035. 85	Webcam Mesin Anjungan Pegawai
136	02.05.02.0 6.036	Tangga Aluminium	Krisbow / EN 131	202 0	Pembe lian	1,000. 00	Tangga Lipat Alumunium (Sub Bid Data)
137	02.05.02.0 6.038	Dispenser	Polytron / PWC 776 Seri WD 170800450	202 2	Pembe lian	2,700. 00	Ruang Kepala BKPSDM
138	02.05.02.0 6.038	Dispenser	Polytron / PWC 776 Seri WD 170800450	202 2	Pembe lian	2,700. 00	Ruang Pantry
139	02.05.02.0 6.047	Coffee Maker	Electrolux / ECM-3505- Coffee Maker	202 0	Pembe lian	907.50	Sekretariat / Umum
140	02.05.02.0 6.059	Gordyin/Kray	- / -	201 5	Pembe lian	78,632 .40	Kegiatan: Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
141	02.05.03.0 1.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Lokal / Mebel	200 8	Pembe lian	600.00	Rusak Berat
142	02.05.03.0 1.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Lokal / Mebel	200 9	Pembe lian	3,800. 00	Rusak Berat
143	02.05.03.0 1.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / Meja kerja	200 5	Pembe lian	750.00	Kasubag Perencanaa n Rusak Berat
144	02.05.03.0 1.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / Meja kerja	200 9	Pembe lian	1,500. 00	Kasubbid Kespeg Rusak Berat
145	02.05.03.0 3.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	XABER / xr 602 Kursi Gaming	202 2	Pembe lian	2,450. 00	Ruang Sekretaris BKPSDM
146	02.05.03.0 3.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	G council / Kursi Kantor	202 3	Pembe lian	3,600. 29	Kursi Kerja Pejabat Ess

N o.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tah un Pem - beli an	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sandaran Tinggi				II (Kepala BKPSDM)
1 4 7	02.05.03.0 3.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Lokal / Mebel	200 9	Pembe lian	400.00	Rusak Berat
1 4 8	02.05.03.0 3.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / Mebel	200 8	Pembe lian	750.00	Rusak Berat
1 4 9	02.05.03.0 3.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / Mebel	200 9	Pembe lian	4,550. 00	Rusak Berat
1 5 0	02.05.03.0 3.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Lokal	200 6	Pembe lian	1,950. 00	Rusak Berat
1 5 1	02.05.03.0 3.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Lokal	200 9	Pembe lian	3,300. 00	Rusak Berat
1 5 2	02.05.03.0 3.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Lokal	200 6	Pembe lian	1,950. 00	Rusak Berat
1 5 3	02.05.03.0 6.004	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	Chairman / Kursi	200 6	Pembe lian	4,000. 00	Rusak Berat
1 5 4	02.05.03.0 6.004	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	Lokal Jati / Mebel	201 1	Pembe lian	4,980. 00	Rusak Berat
1 5 5	02.05.03.0 7.004	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	NoName / Rak Buku	202 2	Pembe lian	9,900. 00	Pengadaan Lemari Buku Pejabat Eselon II
1 5 6	02.05.03.0 7.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Viktoria / Rollpack	200 9	Pembe lian	44,000 .00	
1 5 7	02.05.03.0 7.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Viktoria / Rollpack	201 0	Pembe lian	44,000 .00	
1 5 8	02.05.03.0 7.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Victoria / Rollpach	201 1	Pembe lian	52,775 .00	
1 5 9	02.05.03.0 7.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Viktoria / Rollpack	201 0	Pembe lian	44,000 .00	
1 6 0	02.05.03.0 7.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	lokal / lemari arsip Dinding	200 6	Pembe lian	30,000 .00	Rusak Berat
1 6 1	02.05.03.0 7.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Lion / 2 Pintu	201 4	Pembe lian	8,010. 00	
1 6 2	02.05.03.0 7.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Lokal / Pintu Kaca 2 Pintu	201 4	Pembe lian	2,137. 50	Diruangan Sekretaris

N o.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tah un Pem - beli an	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	8
1 6 3	02.05.03.0 7.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Lion / Sleding	201 4	Pembe lian	10,010 .00	
1 6 4	02.05.03.0 7.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Victoria / Roll Pack	201 4	Pembe lian	51,739 .60	
1 6 5	02.05.03.0 7.009	Buffet Kaca	lokal / lemari arsip Dinding	200 7	Pembe lian	500.00	Rusak Berat
1 6 6	02.06.01.0 1.036	Microphone/ Wireless MIC	Shure / Power mute and battery LED	201 6	Pembe lian	2,100. 00	Penunjang Kegiatan Ruang Rapat Besar
1 6 7	02.06.01.0 1.048	Uninterruptib le Power Supply (UPS)	ica	200 7	Pembe lian	700.00	
1 6 8	02.06.01.0 1.048	Uninterruptib le Power Supply (UPS)	ICA CE 1200 / CE 1200	201 2	Pembe lian	1,270. 00	
1 6 9	02.06.01.0 1.048	Uninterruptib le Power Supply (UPS)	ICA / CE 1200	201 3	Pembe lian	5,170. 00	
1 7 0	02.06.01.0 1.048	Uninterruptib le Power Supply (UPS)	ICA / CE 1200	201 4	Pembe lian	9,216. 00	
1 7 1	02.06.01.0 1.048	Uninterruptib le Power Supply (UPS)	VESTA / VT 1200	201 4	Pembe lian	3,400. 00	
1 7 2	02.06.01.0 1.048	Uninterruptib le Power Supply (UPS)	VESTA / VT 1200	201 4	Pembe lian	1,725. 00	Harga termasuk PPHP
1 7 3	02.06.01.0 1.048	Uninterruptib le Power Supply (UPS)	VESTA / VT 1200	201 4	Pembe lian	1,700. 00	
1 7 4	02.06.01.0 1.048	Uninterruptib le Power Supply (UPS)	APC / 3000	201 4	Pembe lian	19,965 .00	Kegiatan CPNS
1 7 5	02.06.01.0 1.048	Uninterruptib le Power Supply (UPS)	APC SUA / 1500R Mi2U	201 5	Pembe lian	12,095 .00	Kegiatan: Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1 7 6	02.06.01.0 1.048	Uninterruptib le Power Supply (UPS)	ICA / 1082B	201 5	Pembe lian	5,000. 00	Penunjang kegiatan di Sekretariat
1 7 7	02.06.01.0 1.048	Uninterruptib le Power Supply (UPS)	ICA / 1082B	201 5	Pembe lian	5,000. 00	Penunjang kegiatan di Sekretariat
1 7 8	02.06.01.0 1.048	Uninterruptib le Power Supply (UPS)	ICA / 1082B	201 5	Pembe lian	5,000. 00	Penunjang kegiatan di Sekretariat
1 7 9	02.06.01.0 1.048	Uninterruptib le Power Supply (UPS)	ICA / 1082B	201 5	Pembe lian	5,000. 00	Penunjang kegiatan di Kespeg & KH
1 8 0	02.06.01.0 1.048	Uninterruptib le Power Supply (UPS)	ICA / 1082B	201 5	Pembe lian	5,000. 00	Penunjang kegiatan di Kespeg & KH

N o.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tah un Pem - beli an	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	8
181	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA / 1082B	2015	Pembelian	5,000.00	Penunjang kegiatan di Kespeg & KH
182	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA / 1082B	2015	Pembelian	5,000.00	Penunjang kegiatan di Kespeg & KH
183	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA / 1082B	2015	Pembelian	5,000.00	Penunjang kegiatan di Diklat
184	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA / 1082B	2015	Pembelian	5,000.00	Penunjang kegiatan di Diklat
185	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA / CV 700	2015	Pembelian	1,187.50	Penunjang kegiatan di Sub Pengembangan Karier
186	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA / RN 2000	2015	Pembelian	7,842.00	Kegiatan Penataan Ruangan Data dan Jaringan
187	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA SE3100 / 3000 VA	2019	Pembelian	13,800.00	Pengadaan UPS / Stabilizer
188	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA / CE1200	2020	Pembelian	1,485.00	Sub Bid Data
189	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA / CE1200	2020	Pembelian	1,485.00	Sub Bid Perencanaan dan Pengadaan ASN
190	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	APC / BX1600MI-MS-1	2022	Pembelian	2,983.00	Bidang Data dan Informasi ASN
191	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	APC / BX1600MI-MS-1	2022	Pembelian	2,983.00	Bidang Data dan Informasi ASN
192	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	APC / BX1600MI-MS-1	2022	Pembelian	2,983.00	Bidang Data dan Informasi ASN
193	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	APC / BX1600MI-MS-1	2022	Pembelian	2,983.00	Bidang Data dan Informasi ASN
194	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	APC / BX1600MI-MS-1	2022	Pembelian	2,983.00	Bidang Data dan Informasi ASN
195	02.06.01.01.074	Digital Audio Storage System	X-Sys / CS450MK II-B	2021	Pembelian	4,592.50	Digital Audio Storage System (Assessment)

N o.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tah un Pem - beli an	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	8
1 9 6	02.06.01.0 1.096	peralatan studio audio lainnya (dst)	Brite Screen	201 5	Pembe lian	3,850. 00	Tripod Screen (Mutasi)
1 9 7	02.06.01.0 1.096	peralatan studio audio lainnya (dst)	SONY / DSC- W830/BC (Black)	201 5	Pembe lian	2,618. 00	Penunjang Kegiatan BKD
1 9 8	02.06.01.0 1.096	peralatan studio audio lainnya (dst)	Otomatic	201 6	Pembe lian	7,200. 00	screen background foto badge (colour)
1 9 9	02.06.01.0 1.096	peralatan studio audio lainnya (dst)	CANON / EOS 700D	201 5	Pembe lian	9,537. 00	Kegiatan seleksi penerimaan CPNS
2 0 0	02.06.01.0 2.003	Camera Electronic	Sony	200 6	Pembe lian	3,000. 00	
2 0 1	02.06.01.0 2.003	Camera Electronic	Epson / EB 945 H 581C	201 5	Pembe lian	11,220 .00	Infocus Proyektor
2 0 2	02.06.01.0 2.003	Camera Electronic	Canon / Digital	201 0	Pembe lian	4,500. 00	
2 0 3	02.06.01.0 2.003	Camera Electronic	Nikon / .	201 1	Pembe lian	7,000. 00	
2 0 4	02.06.01.0 2.003	Camera Electronic	CANON / CMOS	201 3	Pembe lian	14,050 .00	
2 0 5	02.06.01.0 2.003	Camera Electronic	CANON / CMOS	201 4	Pembe lian	8,884. 00	Harga termasuk PPHP
2 0 6	02.06.01.0 2.045	Tripod Camera	lokal / setik	201 0	Pembe lian	3,000. 00	
2 0 7	02.06.01.0 2.126	Camera Digital	Canon / EOS 4000D	202 1	Pembe lian	4,702. 50	Camera Canon EOS 4000D (Assessmen t)
2 0 8	02.06.01.0 2.126	Camera Digital	FUJIFILM / X-T4 Kit	202 1	Pembe lian	46,667 .50	Camera Pro (Mobile) Sekretariat
2 0 9	02.06.01.0 2.163	Camera Conference	Logitech / Rally plus,PTZ camera with up to UHD 4K resolution	202 3	Pembe lian	61,327 .50	Conference System Rally Plus ( Ruangan Rapat Besar )
2 1 0	02.06.01.0 4.045	Mesin Barcode	LOGIC / Handheld bercode	202 0	Pembe lian	400.00	Scan Barcode kegiatan CPNS TA 2019
2 1 1	02.06.01.0 4.045	Mesin Barcode	LOGIC / Handheld bercode	202 0	Pembe lian	400.00	Scan Barcode kegiatan CPNS TA 2019
2 1 2	02.06.02.0 1.006	Handy Talky (HT)	ICOM / IC- V80 VHF Transceiver	201 5	Pembe lian	2,368. 30	Di Gudang BKD

N o.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tah un Pem - beli an	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	8
2 1 3	02.06.02.0 1.006	Handy Talky (HT)	ICOM / IC- V80 VHF Transceiver	201 5	Pembe lian	2,368. 30	Di Gudang BKD
2 1 4	02.06.02.0 1.006	Handy Talky (HT)	ICOM / IC- V80 VHF Transceiver	201 5	Pembe lian	2,368. 30	Di Gudang BKD
2 1 5	02.06.02.0 1.006	Handy Talky (HT)	ICOM / IC- V80 VHF Transceiver	201 5	Pembe lian	2,368. 30	Di Gudang BKD
2 1 6	02.06.02.0 1.010	Facsimile	Panasonic / Telepon	200 6	Pembe lian	1,200. 00	
2 1 7	02.06.02.0 6.002	Wireless Amplifier	KREZT / Toa	201 0	Pembe lian	7,700. 00	
2 1 8	02.06.02.0 6.002	Wireless Amplifier	WESTON / HDT- 3088USB	201 3	Pembe lian	4,500. 00	
2 1 9	02.06.02.0 6.002	Wireless Amplifier	WESTON / HDT- 3088USB	201 3	Pembe lian	4,500. 00	
2 2 0	02.06.02.0 6.007	alat komunikasi sosial lainnya (dst)	Toshiba TDP / Infocos	200 8	Pembe lian	16,750 .00	Infokus/pro yektor
2 2 1	02.06.02.0 6.007	alat komunikasi sosial lainnya (dst)	Toshiba TDP / Infocus	201 0	Pembe lian	18,065 .00	Infocus/pro yektor
2 2 2	02.06.02.0 6.007	alat komunikasi sosial lainnya (dst)	Tosiba / .	201 1	Pembe lian	18,507 .00	LCD/Infocu s
2 2 3	02.06.02.0 7.005	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	Finger Spot / Revo WFH- 208BNC	202 2	Pembe lian	7,450. 50	Mesin Finger Print Door Lt.5 BKPSDM
2 2 4	02.06.02.0 7.005	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	Fingerspot Revo WFV- 208BNC / Magnetic 180 - S	202 4	Pembe lian	7,849. 92	Mesin Finger Printer Door (Lt. 5 BKPSDM)
2 2 5	02.06.02.0 7.005	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	Fingerspot Revo WFV- 208BNC / Magnetic 180 - S	202 4	Pembe lian	7,849. 92	Mesin Finger Printer Door (Lt.3 BKPSDM)
2 2 6	02.06.02.1 1.001	alat komunikasi lainnya lainnya (dst)	SAMSUNG A55 / Exynos 1480 5G	202 4	Pembe lian	26,800 .00	Smartphon e Samsung A55
2 2 7	02.06.03.4 7.005	sumber tenaga lainnya (dst)	GS Premium	201 6	Pembe lian	885.00	
2 2 8	02.07.01.0 1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	Lotus / Infrared Forehed Thermometer	202 0	Pembe lian	1,900. 00	Digital Thermomet er (ThermoGu n)
2 2 9	02.07.01.0 1.169	Alat Kedokteran	Beurer / FT 65	202 0	Pembe lian	1,300. 00	Alat Ukur Suhu

N o.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tah un Pem - beli an	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	8
		umum lainnya					(ThermoGu n)
2 3 0	02.07.01.0 1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	Beurer / FT 65	202 0	Pembe lian	1,300. 00	Alat Ukur Suhu (ThermoGu n)
2 3 1	02.08.01.1 2.024	Stabilizer	ICA / FRc 5000	201 5	Pembe lian	14,100 .00	Kegiatan Penataan Ruangan Data dan Jaringan
2 3 2	02.08.01.1 2.024	Stabilizer	ICA FRC 5000 / FRC 5000	202 4	Pembe lian	12,299 .91	Stabilizer Server Simpeg
2 3 3	02.08.01.1 7.023	Video Printer	Hp / Laser Color	200 7	Pembe lian	12,000 .00	Printer Absensi
2 3 4	02.08.03.0 3.033	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst)	Logitec Wireless / KM 345	201 5	Pembe lian	2,310. 00	Pengadaan peralatan jaringan
2 3 5	02.08.07.0 2.046	Air Purlier	Philips / Air Purifier 1000 series Nano Protect HEPA S3	202 1	Pembe lian	3,822. 50	Air Purifier
2 3 6	02.08.07.0 2.046	Air Purlier	Philips / Air Purifier 1000 series Nano Protect HEPA S3	202 1	Pembe lian	3,822. 50	Air Purifier
2 3 7	02.08.07.0 2.046	Air Purlier	Philips / Air Purifier 1000 series Nano Protect HEPA S3	202 1	Pembe lian	3,822. 50	Air Purifier
2 3 8	02.08.07.0 2.046	Air Purlier	Philips / Air Purifier 1000 series Nano Protect HEPA S3	202 1	Pembe lian	3,822. 50	Air Purifier
2 3 9	02.08.07.0 2.046	Air Purlier	Philips / Air Purifier 1000 series Nano Protect HEPA S3	202 1	Pembe lian	3,822. 50	Air Purifier
2 4 0	02.08.07.0 3.013	Portable Noise Monitoring	NORTBAYOU / AVA1500- 60-1P	202 0	Pembe lian	1,988. 00	Tripod Televisi (umum)
2 4 1	02.10.01.0 1.001	Mainframe (Komputer Jaringan)	. / aplikasi	200 9	Pembe lian	23,400 .00	Komputer Back Up Data Base
2 4 2	02.10.01.0 1.003	Local Area Network (LAN)	DELL / T320	201 4	Pembe lian	46,172 .50	Kegiatan CPNS
2 4 3	02.10.01.0 1.008	Komputer Jaringan lainnya	Acer / PC	201 0	Pembe lian	22,717 .70	
2 4 4	02.10.01.0 1.008	Komputer Jaringan lainnya	Acer	201 1	Pembe lian	5,905. 90	Rusak Berat



N o.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tah un Pem - beli an	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	8
2 4 5	02.10.01.0 1.008	Komputer Jaringan lainnya	-	201 0	Pembe lian	126,50 0.00	*rekon pengadaan komputer Rusak Berat
2 4 6	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	Asus / .	201 1	Pembe lian	8,008. 00	
2 4 7	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	LG	200 9	Pembe lian	10,000 .00	Rusak Berat
2 4 8	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	LG	200 7	Pembe lian	30,000 .00	
2 4 9	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	HP	200 9	Pembe lian	5,000. 00	Komputer Simpeg
2 5 0	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	Hp / .	200 9	Pembe lian	14,040 .00	Rusak Berat
2 5 1	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	HP W2702 Pavilion / W2702 Pavilion	201 2	Pembe lian	19,940 .00	
2 5 2	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	Aser Aspira M 1930 / M 1930	201 2	Pembe lian	9,970. 00	
2 5 3	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	Asus CM 6431- 1D001D / CM 6431- 1D001D	201 2	Pembe lian	5,500. 00	Dari perlengkap an & Umum
2 5 4	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	Asus CM6431- 1D001D / CM6431- 1D001D	201 2	Pembe lian	11,000 .00	Dari Perlengkap an & Umum
2 5 5	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	-	200 9	Pembe lian	10,000 .00	*ditemukan tahun 2013 (note book Toshiba) Rusak Berat
2 5 6	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	ACER / Aspire Z3 605	201 4	Pembe lian	9,399. 00	Aplikasi Simpeg di Bid. Mutasi
2 5 7	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	ACER / Aspire Z3 605	201 4	Pembe lian	9,399. 00	Aplikasi Simpeg (pemakai Bayu K)
2 5 8	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	ACER / Aspire Z3 605	201 4	Pembe lian	9,399. 00	Aplikasi Simpeg (Pemakai Djito)
2 5 9	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	ACER / Aspire Z3 605	201 4	Pembe lian	9,399. 00	Aplikasi Simpeg (Pemakai Katimin)
2 6 0	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	ACER / Aspire Zc 105 AMD	201 4	Pembe lian	7,649. 00	(pemakai putra)



N o.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tah un Pem - beli an	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	8
261	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	ACER / Aspire Zc 105 AMD	201 4	Pembe lian	7,649. 00	(pemakai Parmuji)
262	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	ACER / Aspire Z3 605	201 4	Pembe lian	9,399. 00	Aplikasi Simpeg (Pada Bid. Diklat)
263	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	Lenovo / Processor Intel J1800	201 5	Pembe lian	7,150. 00	Bid. Pengemban gan dan Data
264	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	Lenovo / Processor Intel J1800	201 5	Pembe lian	7,150. 00	Bid. Sekretariat
265	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	Lenovo / Processor Intel J1800	201 5	Pembe lian	7,150. 00	Bid. Mutasi
266	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	Lenovo / Processor Intel J1800	201 5	Pembe lian	7,150. 00	Bid. Diklat
267	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	Lenovo / Processor Intel J1800	201 5	Pembe lian	7,150. 00	Bid. Kespeg dan KH
268	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	Lenovo / Processor Intel J1800	201 5	Pembe lian	7,150. 00	Bid. Kespeg dan KH
269	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	Lenovo / Processor Intel J1800	201 5	Pembe lian	7,150. 00	Bid. Kespeg dan KH
270	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	HP / i34170T Processor	201 5	Pembe lian	10,450 .00	Kegiatan seleksi penerimaan CPNS
271	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	HP / i34170T Processor	201 5	Pembe lian	10,450 .00	Kegiatan seleksi penerimaan CPNS
272	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	HP / i34170T Processor	201 5	Pembe lian	10,450 .00	Kegiatan seleksi penerimaan CPNS
273	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	HP / i34170T Processor	201 5	Pembe lian	10,450 .00	Kegiatan seleksi penerimaan CPNS
274	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	HP / i34170T Processor	201 5	Pembe lian	10,450 .00	Kegiatan seleksi penerimaan CPNS
275	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	HP / i34170T Processor	201 5	Pembe lian	10,450 .00	Kegiatan seleksi penerimaan CPNS
276	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	HP / i34170T Processor	201 5	Pembe lian	10,450 .00	Kegiatan seleksi penerimaan CPNS
277	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	HP / i34170T Processor	201 5	Pembe lian	10,450 .00	Kegiatan seleksi penerimaan CPNS

N o.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tah un Pem - beli an	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	8
278	02.10.01.02.001	P.C Unit	HP / i34170T Processor	2015	Pembe lian	10,450.00	Kegiatan seleksi penerimaan CPNS
279	02.10.01.02.001	P.C Unit	HP / i34170T Processor	2015	Pembe lian	10,450.00	Kegiatan seleksi penerimaan CPNS
280	02.10.01.02.001	P.C Unit	ASUS All-in-One V222UAK / Intel Core i5	2019	Pembe lian	9,667.00	Kegiatan Ruang Assess
281	02.10.01.02.001	P.C Unit	ASUS All-in-One V222UAK / Intel Core i5	2019	Pembe lian	9,667.00	Kegiatan Ruang Assess
282	02.10.01.02.001	P.C Unit	ASUS All-in-One V222UAK / Intel Core i5	2019	Pembe lian	9,667.00	Kegiatan Ruang Assess
283	02.10.01.02.001	P.C Unit	ASUS All-in-One V222UAK / Intel Core i5	2019	Pembe lian	9,667.00	Kegiatan Ruang Assess
284	02.10.01.02.001	P.C Unit	ASUS All-in-One V222UAK / Intel Core i5	2019	Pembe lian	9,667.00	Kegiatan Ruang Assess
285	02.10.01.02.001	P.C Unit	ASUS All-in-One V222UAK / Intel Core i5	2019	Pembe lian	9,667.00	Kegiatan Ruang Assess
286	02.10.01.02.001	P.C Unit	ASUS All-in-One V222UAK / Intel Core i5	2019	Pembe lian	9,667.00	Kegiatan Ruang Assess
287	02.10.01.02.001	P.C Unit	ASUS All-in-One V222UAK / Intel Core i5	2019	Pembe lian	9,667.00	Kegiatan Ruang Assess
288	02.10.01.02.001	P.C Unit	ASUS All-in-One V222UAK / Intel Core i5	2019	Pembe lian	9,667.00	Kegiatan Ruang Assess
289	02.10.01.02.001	P.C Unit	ASUS All-in-One V222UAK / Intel Core i5	2019	Pembe lian	9,667.00	Kegiatan Ruang Assess
290	02.10.01.02.001	P.C Unit	ASUS All-in-One V222UAK / Intel Core i5	2019	Pembe lian	9,667.00	Kegiatan Ruang Assess
291	02.10.01.02.001	P.C Unit	ASUS All-in-One V222UAK / Intel Core i5	2019	Pembe lian	9,667.00	Kegiatan Ruang Assess
292	02.10.01.02.001	P.C Unit	ASUS All-in-One V222UAK / Intel Core i5	2019	Pembe lian	9,667.00	Kegiatan Ruang Assess
293	02.10.01.02.001	P.C Unit	ASUS All-in-One	2019	Pembe lian	9,667.00	Kegiatan Ruang Assess

N o.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tah un Pem - beli an	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	8
			V222UAK / Intel Core i5				
2 9 4	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	ASUS All-in-One V222UAK / Intel Core i5	201 9	Pembe lian	9,667. 00	Kegiatan Ruang Assess
2 9 5	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	ASUS All-in-One V222UAK / Intel Core i5	201 9	Pembe lian	9,667. 00	Kegiatan Ruang Assess
2 9 6	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	ASUS All-in-One V222UAK / Intel Core i5	201 9	Pembe lian	9,667. 00	Kegiatan Ruang Assess
2 9 7	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	ASUS All-in-One V222UAK / Intel Core i5	201 9	Pembe lian	9,667. 00	Kegiatan Ruang Assess
2 9 8	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	ASUS All-in-One V222UAK / Intel Core i5	201 9	Pembe lian	9,667. 00	Kegiatan Ruang Assess
2 9 9	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	ASUS All-in-One V222UAK / Intel Core i5	201 9	Pembe lian	9,667. 00	Kegiatan Ruang Assess
3 0 0	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	ASUS All-in-One V222UAK / Intel Core i5	201 9	Pembe lian	9,667. 00	Kegiatan Ruang Assess
3 0 1	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	ASUS All-in-One V222UAK / Intel Core i5	201 9	Pembe lian	9,667. 00	Kegiatan Ruang Assess
3 0 2	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	ASUS All-in-One V222UAK / Intel Core i5	201 9	Pembe lian	9,667. 00	Ruangan Kasubag Umum
3 0 3	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	ASUS All-in-One V222UAK / Intel Core i5	201 9	Pembe lian	9,667. 00	Kegiatan Ruang Assess
3 0 4	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	ASUS All-in-One V222 UAK / Intel Core i5	201 9	Pembe lian	9,667. 00	Kegiatan Ruang Assess
3 0 5	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	ASUS All-in-One V222UAK / Intel Core i5	201 9	Pembe lian	9,667. 00	Kegiatan Ruang Assess
3 0 6	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	ASUS All-in-One V222UAK / Intel Core i5	201 9	Pembe lian	9,667. 00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3 0 7	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	ASUS All-in-One V222UAK / Intel Core i5	201 9	Pembe lian	9,667. 00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3 0 8	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	ASUS All-in-One V222UAK / Intel Core i5	201 9	Pembe lian	9,667. 00	Ruang Assessor (Annissa)

N o.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tah un Pem - beli an	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	8
309	02.10.01.02.001	P.C Unit	ASUS All-in-One V222UAK / Intel Core i5	2019	Pembe lian	9,667.00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
310	02.10.01.02.001	P.C Unit	LENOVO / ThingStation P340	2021	Pembe lian	33,999.00	PC WorkStation (Bidang Data)
311	02.10.01.02.001	P.C Unit	LENOVO / All In One PC V50a series Intel Core i5 10400T	2022	Pembe lian	15,195.90	Pengguna Kabisid Diklat
312	02.10.01.02.001	P.C Unit	LENOVO / All In One PC V50a series Intel Core i5 10400T	2022	Pembe lian	15,195.90	Pengguna Kabisid Mutasi
313	02.10.01.02.001	P.C Unit	LENOVO / All In One PC V50a series Intel Core i5 10400T	2022	Pembe lian	15,195.90	Pengguna Genny I
314	02.10.01.02.001	P.C Unit	LENOVO / All In One PC V50a series Intel Core i5 10400T	2022	Pembe lian	15,195.90	Pengguna Aprilia T
315	02.10.01.02.001	P.C Unit	LENOVO / All In One PC V50a series Intel Core i5 10400T	2022	Pembe lian	15,195.90	Pengguna Sub bag Keuangan
316	02.10.01.02.001	P.C Unit	HP / PC All In One 24 Series Intel Core i5	2023	Pembe lian	14,300.13	Ruang Kepala Badan
317	02.10.01.02.001	P.C Unit	HP / PC All In One 24 Series Intel Core i5	2023	Pembe lian	14,300.13	Ruang Aula Rapat Besar
318	02.10.01.02.001	P.C Unit	HP / PC All In One 24 Series Intel Core i5	2023	Pembe lian	14,300.13	Ruang Aula Rapat Kecil
319	02.10.01.02.001	P.C Unit	HP / PC All In One 24 Series Intel Core i5	2023	Pembe lian	14,300.13	Pengguna Norol Padhli
320	02.10.01.02.001	P.C Unit	HP / PC All In One 24 Series Intel Core i5	2023	Pembe lian	14,300.13	Pengguna Sri Suhartati
321	02.10.01.02.001	P.C Unit	HP / PC All In One 24 Series Intel Core i5	2023	Pembe lian	14,300.13	Pengguna Bendahara
322	02.10.01.02.001	P.C Unit	HP / PC All In One 24 Series Intel Core i5	2023	Pembe lian	14,300.13	Pengguna Mulyadi

N o.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tah un Pem - beli an	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	8
3 2 3	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	HP / PC All In One 24 Series Intel Core i5	202 3	Pembe lian	14,300 .13	Pengguna Ferial
3 2 4	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	HP / PC All In One 24 Series Intel Core i5	202 3	Pembe lian	14,300 .13	Pengguna Pudji
3 2 5	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	HP / PC All In One 24 Series Intel Core i5	202 3	Pembe lian	14,300 .13	Pengguna Prima Dyan E
3 2 6	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	LENOVO THINKCENTR E / TC Neo 50a Gen 5 Ver 3	202 4	Pembe lian	45,150 .14	Personal Computer Lenovo Thinkcentre
3 2 7	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	LENOVO / Destop TC Neo 50a Gen 5 Ver3 Core i5	202 4	Pembe lian	45,150 .14	PC All In One (Assessmen t, fungsional ASN)
3 2 8	02.10.01.0 2.001	P.C Unit	LENOVO / Desktop TC Neo 50a Gen 5 Ver 3	202 4	Pembe lian	30,100 .09	PC All In One (Assessmen t, Fungsional ASN)
3 2 9	02.10.01.0 2.002	Lap Top	ASUS / IC i5 4200U	201 5	Pembe lian	12,000 .00	Pemegang Faurina W
3 3 0	02.10.01.0 2.002	Lap Top	HP / Intel Core i7- 6500U	201 5	Pembe lian	13,640 .00	Kegiatan seleksi penerimaan CPNS
3 3 1	02.10.01.0 2.002	Lap Top	HP / Intel Core i7- 6500U	201 5	Pembe lian	13,640 .00	Kegiatan seleksi penerimaan CPNS
3 3 2	02.10.01.0 2.002	Lap Top	HP / Intel Core i7- 6500U	201 5	Pembe lian	13,640 .00	Kegiatan seleksi penerimaan CPNS
3 3 3	02.10.01.0 2.002	Lap Top	HP / Intel Core i7- 6500U	201 5	Pembe lian	13,640 .00	Kegiatan seleksi penerimaan CPNS
3 3 4	02.10.01.0 2.002	Lap Top	HP / Intel Core i7- 6500U	201 5	Pembe lian	13,640 .00	Kegiatan seleksi penerimaan CPNS
3 3 5	02.10.01.0 2.002	Lap Top	HP / Intel Core i7- 6500U	201 5	Pembe lian	13,640 .00	Kegiatan seleksi penerimaan CPNS
3 3 6	02.10.01.0 2.002	Lap Top	HP / Intel Core i7- 6500U	201 5	Pembe lian	13,640 .00	Kegiatan seleksi penerimaan CPNS
3 3 7	02.10.01.0 2.002	Lap Top	HP / Intel Core i7- 6500U	201 5	Pembe lian	13,640 .00	Kegiatan seleksi

N o.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tah un Pem - beli an	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	8
							penerimaan CPNS
338	02.10.01.0 2.002	Lap Top	ASUS / ROG STRIX G15/17	202 0	Pembe lian	19,990 .00	Sub Bid Diklat (Ikbal)
339	02.10.01.0 2.002	Lap Top	ASUS / ROG STRIX G15/17	202 0	Pembe lian	19,990 .00	Sub Bag Umum
340	02.10.01.0 2.002	Lap Top	LENOVO / ThinkPad L13Series Intel Core i7	202 0	Pembe lian	19,990 .00	Sub Bag Umum
341	02.10.01.0 2.002	Lap Top	ThingPad / L14	202 1	Pembe lian	19,992 .50	Laptop ThingPad
342	02.10.01.0 2.002	Lap Top	LENOVO ThingPad / X13 Series	202 2	Pembe lian	29,859 .00	Bidang Mutasi (Evi Nurharyanti)
343	02.10.01.0 2.002	Lap Top	LENOVO TIHINKPAD / Thinkpad E14 Gen 5	202 4	Pembe lian	93,750 .05	Laptop Lenovo Thinkpad E14 Gen 5
344	02.10.01.0 2.002	Lap Top	LENOVO / ThinkPad E14 Gen 6 inter core Ultra 7	202 4	Pembe lian	75,000 .04	Laptop (Sekretariat , Assessment Center dan Fungsional ASN
345	02.10.01.0 2.002	Lap Top	LENOVO / ThinkPad E14 Gen 6 Inter Core Ultra 7	202 4	Pembe lian	18,750 .01	Laptop (Mutasi)
346	02.10.01.0 2.003	Note Book	Asus / U41J Series	201 1	Pembe lian	9,101. 00	
347	02.10.01.0 2.003	Note Book	Tosiba	200 8	Pembe lian	9,000. 00	
348	02.10.01.0 2.003	Note Book	Dell / Vastro 1088	201 0	Pembe lian	9,790. 00	
349	02.10.01.0 2.003	Note Book	Acer	201 1	Pembe lian	7,592. 20	Pemegang Tria
350	02.10.01.0 2.003	Note Book	Acer	201 1	Pembe lian	7,592. 20	
351	02.10.01.0 2.003	Note Book	Toshiba (Brown) / L 745-1119LB	201 2	Pembe lian	6,400. 00	Pemegang Aisyiah Al W
352	02.10.01.0 2.003	Note Book	Toshiba Satelit L745- S4310 / Satelit L745- S4310	201 2	Pembe lian	6,500. 00	Pemegang Ibu Silvia
353	02.10.01.0 2.003	Note Book	Aser / BE 06600	201 2	Pembe lian	6,363. 00	Pemegang Dodi Hartanto

N o.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tah un Pem - beli an	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	8
3 5 4	02.10.01.0 2.003	Note Book	HP / Intel Core i5	201 2	Pembe lian	8,360. 00	Dari Perlengkap an & Umum
3 5 5	02.10.01.0 2.003	Note Book	Toshiba Satelit L745 S-4310 / Satelit L745 S-4310	201 2	Pembe lian	6,500. 00	
3 5 6	02.10.01.0 2.003	Note Book	Toshiba / Satelite L745- EZ1410D	201 3	Pembe lian	5,997. 00	Pemegang Endang Asmorowati
3 5 7	02.10.01.0 2.003	Note Book	Toshiba / Satelite C840	201 3	Pembe lian	6,210. 00	Pemegang Tiaz
3 5 8	02.10.01.0 2.003	Note Book	Toshiba / Core i3 2350M	201 3	Pembe lian	16,076 .00	
3 5 9	02.10.01.0 2.003	Note Book	DELL / Vastro 1088	201 0	Pembe lian	9,790. 00	*ditemukan tahun 2013
3 6 0	02.10.01.0 2.003	Note Book	LENOVO / G 405 AMD E1	201 4	Pembe lian	5,099. 00	Pemegang Dona Fitriyani
3 6 1	02.10.01.0 2.003	Note Book	LENOVO / G 405 AMD E1	201 4	Pembe lian	5,099. 00	Pemegang Dodi hartanto
3 6 2	02.10.01.0 2.003	Note Book	LENOVO 64 / G 405 AMD E1	201 4	Pembe lian	5,099. 00	Pemegang M. Hidayatulla h MD
3 6 3	02.10.01.0 2.003	Note Book	LENOVO 64 / G 405 AMD E1	201 4	Pembe lian	5,099. 00	Pemegang Kepala Badan
3 6 4	02.10.01.0 2.009	Tablet PC	Samsung Galaxy Tab S3 9.7 / RAM 4 GB Quad- Core	201 8	Pembe lian	61,200 .00	Komputer Tablet (Tim E-Kin)
3 6 5	02.10.01.0 2.009	Tablet PC	SAMSUNG / Galaxy Tab A8	202 2	Pembe lian	5,744. 25	Tablet PC/Tab (Bidang Data/Noor Fadhillah)
3 6 6	02.10.01.0 2.010	Personal Komputer lainnya	-	200 7	Pembe lian	5,000. 00	LCD 15"
3 6 7	02.10.02.0 1.012	Hard Disk	SYNOLOGY / Synology rail kit slding 4- bay 2,1 GHz	202 3	Pembe lian	51,477 .25	Rak Station + NAS 4 bay (Hardisk)
3 6 8	02.10.02.0 1.012	Hard Disk	IBM / SATA NL G2HS	202 3	Pembe lian	16,816 .50	Hard Disk Server Simpeg
3 6 9	02.10.02.0 1.018	peralatan mainframe lainnya (dst)	Toshiba / Infocus	200 8	Pembe lian	19,250 .00	LCD infocus
3 7 0	02.10.02.0 1.018	peralatan mainframe lainnya (dst)	- / 42U W600 D1100	201 5	Pembe lian	24,450 .00	Kegiatan Penataan Ruangan Data dan

N o.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tah un Pem - beli an	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	8
							Jaringan (Rak besi)
3 7 1	02.10.02.0 2.009	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	CANON / IMAGE FORMULA P- 208 II	201 5	Pembe lian	5,400. 00	Penunjang kegiatan di Bidang Mutasi
3 7 2	02.10.02.0 2.009	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Fujitsu / Scanner fi- 7260	202 0	Pembe lian	32,120 .00	Scanner (Bid. Mutasi)
3 7 3	02.10.02.0 2.009	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Epson / Workforce DS-6500	202 0	Pembe lian	13,420 .00	Scanner (Program dan keuangan)
3 7 4	02.10.02.0 3.002	Monitor	LG	201 4	Pembe lian	13,970 .00	Kegiatan CPNS
3 7 5	02.10.02.0 3.002	Monitor	ASUS / Monitor LED, VGA	201 6	Pembe lian	1,050. 00	Kegiatan foto badge
3 7 6	02.10.02.0 3.002	Monitor	Touchindo / Monitor Touchscreen 17" square	202 3	Pembe lian	3,940. 50	Monitor untuk mesin anjungan pegawai
3 7 7	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Cannon / .	201 1	Pembe lian	1,375. 00	Rusak Berat
3 7 8	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laser Jet Pro P1102 / Laser Jet Pr P1102	201 2	Pembe lian	1,340. 00	
3 7 9	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	canon	200 9	Pembe lian	936.00	Rusak Berat
3 8 0	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L 200 / L 200	201 2	Pembe lian	2,035. 00	Dari Perlengkap an & Umum
3 8 1	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Nisca PR - C101 / PR - C101/Cetak Bedge	201 2	Pembe lian	21,975 .00	
3 8 2	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	201 0	Pembe lian	1,200. 00	
3 8 3	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / LX 300+	201 3	Pembe lian	1,818. 00	
3 8 4	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / C472A	201 3	Pembe lian	4,237. 50	Printer Tinta/Toner
3 8 5	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	canon	200 8	Pembe lian	800.00	Rusak Berat



N o.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tah un Pem - beli an	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	8
386	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / P471A	2013	Pembe lian	3,658. 50	Printer Pita
387	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / Work Force M200	2014	Pembe lian	2,500. 00	
388	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANNON / Pixma iP 2770	2014	Pembe lian	1,100. 00	
389	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	epson	2010	Pembe lian	5,000. 00	
390	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	epson	2009	Pembe lian	1,050. 00	
391	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L550 Tinta	2014	Pembe lian	4,740. 00	
392	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / Laserjet Pro CP 1025	2014	Pembe lian	3,699. 00	
393	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANNON / Pixma MX 397	2014	Pembe lian	1,470. 00	
394	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANNON / Pixma iP 2770	2014	Pembe lian	1,100. 00	
395	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON / Pixma E510	2014	Pembe lian	3,600. 00	Printer Multi Fungsi
396	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	hp	2008	Pembe lian	450.00	Rusak Berat
397	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / LX-310	2014	Pembe lian	2,605. 00	Harga termasuk PPHP
398	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / Laserjet 1536 dnf MFP	2014	Pembe lian	4,700. 00	Printer multi fungsi
399	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L220	2015	Pembe lian	3,000. 00	Bendahara
400	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / LQ2190	2011	Pembe lian	7,815. 50	
401	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / LX 310	2015	Pembe lian	3,000. 00	Penunjang kegiatan di Bid Mutasi

N o.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tah un Pem - beli an	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	8
		Personal Komputer)					
4 0 2	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Samsung / M12240	201 1	Pembe lian	1,375. 00	
4 0 3	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L220	201 5	Pembe lian	3,000. 00	Penunjang kegiatan di Bid Mutasi
4 0 4	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Cannon / .	200 8	Pembe lian	1,250. 00	
4 0 5	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L565	201 5	Pembe lian	6,000. 00	Penunjang kegiatan di Bid Kespek & KH
4 0 6	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON / PIXMA E400	201 5	Pembe lian	1,200. 00	Penunjang kegiatan di Subbid Karier Pegawai
4 0 7	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Nisca PR C 101 / Dual sided or singel sided, print Method	201 8	Pembe lian	29,500 .00	Printer Bagde Rusak Berat
4 0 8	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON / PIXMA E400	201 5	Pembe lian	1,200. 00	Kasubag Perencanaa n Program
4 0 9	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON / PIXMA E400	201 5	Pembe lian	1,200. 00	Penunjang kegiatan di Bid Kespeg & KH
4 1 0	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON / PIXMA E400	201 5	Pembe lian	1,200. 00	Penunjang kegiatan di Bid Kespeg & KH
4 1 1	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON / PIXMA E400	201 5	Pembe lian	1,200. 00	Penunjang kegiatan di BId Kespeg & KH
4 1 2	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Nisca / PR- C101	202 0	Pembe lian	28,270 .00	Printer Badge
4 1 3	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L120	202 0	Pembe lian	1,595. 00	Sub Bid Perencanaa n & Pengadaan ASN
4 1 4	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L120	202 0	Pembe lian	1,595. 00	Subbid Kompetensi & Kinerja
4 1 5	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / M200	202 0	Pembe lian	2,640. 00	Sub Bid. Mutasi Jabatan

N o.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tah un Pem - beli an	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	8
4 1 6	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / M200	202 0	Pembe lian	2,640. 00	Sub Bid Mutasi Jabatan
4 1 7	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / M200	202 0	Pembe lian	2,640. 00	Sub Bag Umum
4 1 8	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / M200	202 0	Pembe lian	2,640. 00	Sub Bid Kompetensi & Kinerja
4 1 9	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / LQ310	202 0	Pembe lian	2,794. 00	Sub Bag Umum
4 2 0	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / LQ310	202 0	Pembe lian	2,794. 00	Sub Bid Perencanaa n & Pengadaan ASN
4 2 1	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L 6170	202 0	Pembe lian	4,994. 00	Sub bag Program & Keuangan
4 2 2	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L 6170	202 0	Pembe lian	4,994. 00	Sub Bag Umum
4 2 3	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / LQ 2190	202 1	Pembe lian	7,890. 00	Printer Dot Matrix (Bendahara )
4 2 4	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L3110 / Multifungsi	202 1	Pembe lian	2,860. 00	Ruang Kasubag Umum
4 2 5	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L6290 STD 5 / Print/scan/c opy/fax with ADF	202 2	Pembe lian	6,250. 00	Printer Multifungsi (Sekretariat )
4 2 6	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L6290 STD 5 / Print/scan/c opy/fax with ADF	202 2	Pembe lian	6,250. 00	Printer Multifungsi (Bidang Diklat dan Pengemban gan)
4 2 7	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L6290 STD 5 / Print/scan/c opy/fax with ADF	202 2	Pembe lian	6,250. 00	Printer Multifungsi (Bidang Data dan Informasi ASN)
4 2 8	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L6290 STD 5 / Print/scan/c opy/fax with ADF	202 2	Pembe lian	6,250. 00	Printer Multifungsi (Bidang Mutasi)
4 2 9	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L6290 STD 5 / Print/scan/c	202 2	Pembe lian	6,250. 00	Printer Multifungsi (Subbag Keuangan)

N o.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tah un Pem - beli an	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	8
			opy/fax with ADF				
4 3 0	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L6290 Injek Ecotank A4 WIFI	202 3	Pembe lian	7,100. 67	Printer Injek A4 Wfi (Kasubag Umum)
4 3 1	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / EcoTank L6270	202 4	Pembe lian	7,100. 00	Pengadaan printer EcoTank (Bidang Mutasi)
4 3 2	02.10.02.0 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / EcoTank L6270	202 4	Pembe lian	7,100. 00	Pengadaan printer EcoTank (Subbid Kompetensi )
4 3 3	02.10.02.0 3.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	HP Scanjet Enterprise 7500 / Enterpries 7500	201 2	Pembe lian	19,975 .00	
4 3 4	02.10.02.0 3.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	FUJITSU / Fi-7260	202 1	Pembe lian	32,000 .00	Scanner (Data)
4 3 5	02.10.02.0 3.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / PERFECTION V600	202 3	Pembe lian	5,900. 09	Scanner (Sekretariat )
4 3 6	02.10.02.0 3.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / Workforce DS-570WII	202 3	Pembe lian	13,014 .75	Scanner (Sekretariat )
4 3 7	02.10.02.0 3.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	FUJITSU / iX400	202 3	Pembe lian	11,000 .00	SCANNER BIDANG PENGEMBA NGAN DAN DIKLAT ( DIKLAT DAN TUBEL)
4 3 8	02.10.02.0 3.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / Workforce DS - 770 II	202 4	Pembe lian	17,149 .94	Scanner (Penilaian Kompetensi dan Pembinaan Jafung)
4 3 9	02.10.02.0 3.017	External/ Portable Hardisk	SEAGATE EXPANSION / Expansion HDD S/N NACSF159	202 3	Pembe lian	1,100. 01	Hardisk Eksternal (Martina)
4 4 0	02.10.02.0 3.017	External/ Portable Hardisk	SEAGATE EXPANSION / Expansion HDD S/N NACCLIYR	202 3	Pembe lian	1,700. 52	Hardisk Eksternal
4 4 1	02.10.02.0 3.017	External/ Portable Hardisk	SEAGATE EXPANSION / Expansion	202 3	Pembe lian	2,200. 02	Hardisk Eksternal

N o.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tah un Pem - beli an	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	8
			HDD S/N NACSG4SV				
4 4 2	02.10.02.0 3.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	SEAGATE / USB 3.0 500GB	201 5	Pembe lian	1,200. 00	Penunjang kegiatan di Subbid Karier Pegawai
4 4 3	02.10.02.0 3.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	SEAGATE / USB 3.0 500GB	201 5	Pembe lian	1,200. 00	Penunjang kegiatan di Mutasi
4 4 4	02.10.02.0 3.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	TOSHIBA / USB 3.0 Hard Drive	201 9	Pembe lian	950.00	Kelengkapa n Komputer Hardisk Eksternal
4 4 5	02.10.02.0 3.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	TOSHIBA / USB 3.0 Hard Drive	201 9	Pembe lian	950.00	Kelengkapa n Komputer Hardisk Eksternal
4 4 6	02.10.02.0 3.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	TOSHIBA / USB 3.0 Hard Drive	201 9	Pembe lian	950.00	Kelengkapa n Komputer Hardisk Eksternal
4 4 7	02.10.02.0 3.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	TOSHIBA / USB 3.0 HARD DRIVE	202 0	Pembe lian	924.00	Noor Fadhillah P
4 4 8	02.10.02.0 3.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	TOSHIBA / USB 3.0 HARD DRIVE	202 0	Pembe lian	924.00	Juni Y
4 4 9	02.10.02.0 3.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	TOSHIBA / USB 3.0 HARD DRIVE	202 0	Pembe lian	924.00	Evi N
4 5 0	02.10.02.0 3.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	TOSHIBA / USB 3.0 HARD DRIVE	202 0	Pembe lian	924.00	Gudang
4 5 1	02.10.02.0 3.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	TOSHIBA / USB 3.0 HARD DRIVE	202 0	Pembe lian	924.00	Gudang
4 5 2	02.10.02.0 4.001	Server	IBM SYSTEM / X 3250 M5 B2 1U Custom	201 5	Pembe lian	46,000 .00	Kegiatan: Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4 5 3	02.10.02.0 4.001	Server	HP / Proliant ML 150 Gen9 E5-2620v3	201 5	Pembe lian	84,100 .00	Pengadaan Server Kegiatan Seleksi CPNS
4 5 4	02.10.02.0 4.001	Server	LENOVO / System X 3550 M5	201 6	Pembe lian	72,000 .00	Penunjang Pengolahan Data Pegawai
4 5 5	02.10.02.0 4.001	Server	Hewlett- Packard (Hp) / Pro Liant DL 180 Gen9	201 9	Pembe lian	57,800 .64	Pengadaan Komputer Mainframe/ Server

N o.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Tah un Pem - beli an	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	8
4 5 6	02.10.02.0 4.001	Server	Dell Intel Xeon Gold 5218 / 2 Ea VMware vSphere 7 Standar	202 1	Pembe lian	369,60 0.00	Komputer Mainframe / Server (Data)
4 5 7	02.10.02.0 4.005	Netware Interface External	-	200 9	Pembe lian	1,500. 00	Program Antivirus Rusak Berat
4 5 8	02.10.02.0 4.005	Netware Interface External	-	200 9	Pembe lian	7,000. 00	Jaringan Kabel (antar bidang)
4 5 9	02.10.02.0 4.024	Switch	HP / 2530- 48G	201 5	Pembe lian	41,450 .00	Pengadaan Switch Hub kegiatan seleksi CPNS
4 6 0	02.10.02.0 4.024	Switch	HP / 2530- 48G	201 5	Pembe lian	41,450 .00	Pengadaan Switch Hub kegiatan seleksi CPNS
4 6 1	02.10.02.0 4.024	Switch	CISCO / WS- C2960x- 24TS-LL	201 5	Pembe lian	27,700 .00	Kegiatan Penataan ruangan data dan jaringan
4 6 2	02.10.02.0 4.024	Switch	HP (Hewlett Packard) / OfficeConnec t 1420	201 9	Pembe lian	5,445. 00	Pengadaan Peralatan Jaringan Assessment
4 6 3	02.10.02.0 4.024	Switch	Router / RB 1100AH	202 3	Pembe lian	6,500. 16	Mikrotik Router Server Simpeg
4 6 4	02.10.02.0 4.033	Peralatan Jaringan lainnya	-	200 9	Pembe lian	74,550 .00	Program Aplikasi Aplikasi Kepegawaia n
						6,722,149.69	

2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Balikpapan

Analisa capaian kinerja pelayanan BKPSDM harus didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan baik dalam Norma Standar Kriteria dan Prosedur (NSPK), Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun Indikator target lainnya seperti Indikator Kinerja Utama (IKU).

3.1.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Balikpapan menurut NSPK

Indeks Norma , Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN merupakan salah satu indikator yang juga ditargetkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024. NSPK Manajemen ASN adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan Manajemen ASN. Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian implementasi NSPK Manajemen ASN

dan merupakan salah satu metode pengawasan dan pengendalian implementasi NSPK Manajemen ASN di Instansi Pemerintah. Manfaat penilaian implementasi NSPK manajemen ASN adalah sebagai berikut :

- a. sebagai instrumen untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. sebagai dasar bagi Instansi Pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi Manajemen ASN sudah sesuai dengan NSPK Manajemen ASN di lingkungan instansi masing-masing; dan
- c. sebagai instrumen kontrol sosial Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat agar mampu menjalankan peran sesuai dengan NSPK Manajemen ASN.

Elemen dalam penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN terdiri atas:

- a. Penyusunan Dan Penetapan Kebutuhan ASN;
- b. Pengadaan ASN;
- c. Pengangkatan ASN;
- d. Pangkat;
- e. Mutasi;
- f. Jabatan;
- g. Pengembangan Karier ASN;
- h. Pola Karier;
- i. Penggajian, Tunjangan, Dan Fasilitas;
- j. Penghargaan;
- k. Jaminan Pensiun Dan Jaminan Hari Tua;
- l. Perlindungan;
- m. Penilaian Kinerja;
- n. Cuti;
- o. Kode Etik;
- p. Disiplin;
- q. Pemberhentian;
- r. Pensiun.

Penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN menggunakan formulasi penghitungan Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN. Formulasi penghitungan tersebut berdasarkan rumus pengolahan hasil yang terdapat pada sistem aplikasi indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN. Berdasarkan perhitungan tersebut Kepala BKN menetapkan nilai dan kategori hasil penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Kategori tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Nilai Indeks dengan jumlah antara 85,01 sampai dengan 100,00 diberi kategori A dengan Predikat Unggul;
- b. Nilai Indeks dengan jumlah antara 70,01 sampai dengan 85,00 diberi kategori B dengan Predikat Baik;
- c. Nilai Indeks dengan jumlah antara 55,01 sampai dengan 70,00 diberi kategori C dengan Predikat Cukup;
- d. Nilai Indeks dengan jumlah antara 40,01 sampai dengan 55,00 diberi kategori D dengan Predikat Kurang; dan
- e. Nilai Indeks dengan jumlah antara 25,00 sampai dengan 40,00 diberi kategori E dengan Predikat Buruk.

Capaian kinerja pelayanan BKPSDM berdasarkan NSPK, mulai dihitung pada tahun 2021. Kinerja Pelayanan BKPSDM berdasarkan NSPK mengalami fluktuasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Realisasi NSPK tahun 2021 sebesar 41 meningkat di tahun 2022 menjadi 61 dan pada tahun 2023 nilai indeks manajemen ASN mendapatkan nilai indeks 73,5. pada tahun 2024

terjadi penurunan realisasi NSPK yaitu menjadi 72,68. Masing-masing capaian mulai dari tahun 2022 sampai dengan 2024 adalah 101,67 %, 105% dan 98,21 %. Capaian atas kinerja 2021 tidak dapat dihitung karena pada tahun 2021, nilai indeks manajemen ASN tidak ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

Sampai dengan tahun 2024, NSPK Manajemen ASN masih memiliki predikat Baik. Adapun beberapa kendala dalam pencapaian kinerja NSPK yang belum optimal adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), belum menetapkan dan menerapkan pola karir instansi. Belum ditetapkannya pola karir dikarenakan peraturan kepala daerah tentang pola karir instansi belum disahkan. Sampai dengan saat ini BKPSDM selaku *leading sector* masih terus berkoordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait agar peraturan walikota tentang pola karir segera diterbitkan.
2. Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) belum disusun secara menyeluruh. SKJ baru disusun sebagian yaitu pada tataran Jabatan Tinggi Pratama (JPT). Sampai dengan saat ini masih dilakukan proses penyusunan dan koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Kota Balikpapan secara intensif untuk ketersediaan SKJ secara menyeluruh (manajerial, teknis dan sosiokultural).
3. Belum dilaksanakannya promosi dan mutasi dengan mengacu pada *talent pool* dan rencana suksesi. Hal ini terkendala belum diterbitkannya peraturan kepala daerah tentang pola karir serta masih di kembangkannya aplikasi manajemen talenta.

Sampai dengan saat ini masih terus dilakukan pembaharuan terkait pemenuhan ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan *up to date* yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi. Data kepegawaian tersebut digunakan sebagai bahan promosi dan mutasi dalam manajemen talenta. Pada tahun 2025, akan dilanjutkan tahapan integrasi antara aplikasi manajemen talenta dengan SIMPEG.

4. Belum dilakukannya pembinaan kinerja (coaching, mentoring, konseling) secara berkala. Kedepannya akan dilakukan upaya untuk mendorong ASN untuk melaksanakan *coaching mentoring*.
5. Belum adanya peraturan kepala daerah berbasis kinerja seperti kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi bagi ASN, kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan bagi ASN/bentuk pemberian penghargaan berbasis kinerja. Sampai dengan saat ini peraturan kepala daerah untuk pemberian penghargaan masih dalam proses harmonisasi di Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur. Akan dilakukan koordinasi secara intensif agar peraturan tersebut segera ditetapkan mengingat, BKPSDM telah menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sejak tahun 2024.

### **3.1.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Balikpapan menurut IKK**

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Capaian kinerja urusan pemerintahan terdiri atas Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK *Output*) dan Indikator Kinerja Hasil (IKK *Outcome*).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjabarkan bahwa urusan penunjang pemerintahan dalam lingkup kepegawaian, pendidikan dan pelatihan memiliki 3 (tiga) IKK output.

Berikut merupakan IKK urusan penunjang pemerintahan dalam lingkup kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang diampu BKPSDM Kota Balikpapan pada tahun 2021- 2026.

- a. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah/Dasar (PNS tidak termasuk



guru dan tenaga kesehatan).

Rasio ini mengukur rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dengan rumus sebagai berikut:

Rasio Pegawai Pendidikan  
Tinggi dan  
menengah/Dasar =

Jumlah pegawai  
menurut Pendidikan  
PT ke atas

Seluruh jumlah  
pegawai

X 100 %

Keterangan =

- Jumlah pegawai menurut Pendidikan PT ke atas adalah keseluruhan jumlah ASN yang sudah menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi negeri dan atau swasta tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian daftar seluruh ASN yang sudah menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi.
- Seluruh jumlah pegawai adalah keseluruhan jumlah ASN di pemerintah daerah tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang muat rincian daftar seluruh ASN.

Ketika penyusunan Renstra 2021-2026 ,target IKK didapat melalui formulasi rasio antara jumlah pegawai menurut Pendidikan PT ke atas berbanding dengan seluruh jumlah pegawai dengan jumlah pegawai dengan pendidikan SMA kebawah sementara mulai tahun 2023, melalui penegasan terhadap IKK Provinsi dan kabupaten Kota formulasi tersebut berubah menjadi rasio antara jumlah pegawai menurut Pendidikan PT ke atas berbanding dengan jumlah seluruh pegawai (tidak termasuk guru dan nakes).

Indikator ini mengalami fluktuasi dalam nilai realisasinya. Realisasi IKK ini berturut -turut dari 2021 sampai dengan 2024, yaitu dari 86,40, 107,12, 55,18 dan 57,40. Meskipun target kinerja renstra tidak tercapai karena terjadi perubahan formulasi hitung dari kemendagri, namun jumlah pegawai dengan pendidikan PT ke atas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dari 1155 pegawai pada tahun 2023 naik menjadi 1168 pegawai pada tahun 2024. Rasio ini dari tahun ke tahun akan selalu dinamis mengingat adanya angka penerimaan ASN dan pensiun ASN yang terjadi setiap tahun.

b. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

Rasio ini melihat pegawai fungsional PNS di luar guru dan tenaga Kesehatan. Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rasio pegawai  
Fungsional =

Jumlah pegawai PNS  
fungsional (diluar guru dan  
tenaga kesehatan)

Jumlah pegawai pemerintah  
(PNS tidak termasuk guru  
dan tenaga kesehatan)

X 100 %

Keterangan=

- Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) adalah keseluruhan jumlah ASN yang sudah dilantik menjadi ASN fungsional tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian daftar seluruh ASN yang sudah dilantik menjadi ASN fungsional.
- Jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) adalah keseluruhan jumlah ASN di pemerintah daerah tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang muat rincian daftar seluruh ASN.

Indikator ini mengalami fluktuasi dalam nilai realisasinya. Realisasi IKK ini berturut -turut dari 2021 sampai dengan 2024, yaitu dari 10.30, 20,16, 24.65 dan 23.10. Sampai dengan tahun 2024, capaian kinerja melebihi target dikarenakan kenaikan jumlah pegawai fungsional yang dilantik. Rasio ini dari tahun ke tahun akan selalu dinamis mengingat adanya angka penerimaan PNS, promosi PNS dan pensiun PNS yang terjadi setiap tahun.

c. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi.

Rasio ini Melihat pegawai fungsional bersertifikat kompetensi, di luar tenaga guru dan kesehatan . Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	
Rasio pegawai Fungsional =	<div></div>	X 100 %
	Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	

Indikator ini mengalami peningkatan dan penurunan realisasi dalam rentang waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, yaitu dari 72.20, 59.39, 34.04 dan 36.60. Rasio ini dari tahun ke tahun akan selalu dinamis mengingat adanya angka penerimaan PNS, promosi PNS dan pensiun PNS yang terjadi setiap tahun.

**3.1.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Balikpapan menurut IKU BKPSDM Kota Balikpapan**

**1. Indeks Profesionalitas ASN**

Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Standar Profesionalitas ASN adalah kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Pengukuran Indeks Profesionalitas berdasarkan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 17 Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Rumus

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN merupakan jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$
$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$
$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$
$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$
$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Gambar 7. Rumus perhitungan IP ASN

Sumber: Perka BKN Nomor 8 Tahun 2019

Keterangan:

- IP= Indeks Profesionalisme
- IPi= Indeks Profesionalisme ke-i
- IP 1= Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
- IP 2= Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
- IP 3= Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
- IP 4= Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

Indikator ini mengalami kenaikan realisasi dalam rentang waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, yaitu dari 48.48, 51.21, 62.72 dan 78,59. Capaian pelayanan kinerja ini berturut dari 2022 sampai dengan 2024 adalah 93,11%, 110,03%, dan 124,74 %. Capaian atas kinerja 2021 tidak dapat dihitung karena pada tahun 2021, nilai IP ASN tidak ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

Kenaikan realisasi sampai dengan tahun 2024, terkait erat dengan upaya -upaya yang telah dilakukan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja IP ASN tahun 2024,sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3. Upaya dalam pencapaian IP ASN Sampai dengan Tahun 2024

No	Indikator	Targ et	Realis asi 2024	Realis asi Tahu n 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan IP ASN 2024
1	Indeks Profesionali tas ASN	63	78,59	62,72	124,75 %	1. Penyelesaian Disparitas Data / Updating Data
	Dimensi Kualifikasi		21,17	20,89		1. Pemberian Fasilitasi tugas belajar baik pembiayaan APBD / Mandiri / lain-lain 2. Fasilitasi Pencantuman gelar akademik yang sesuai ketentuan

No	Indikator	Targ et	Realis asi 2024	Realis asi Tahu n 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan IP ASN 2024
	Dimensi Kompetensi		27,43	11,83		1. Telah disampaikan Surat Sekda, kepada seluruh kepala OPD untuk melakukan Updating data kompetensi dan kinerja ASN 2. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui Pelatihan
	Dimensi Kinerja		24,99	24,79		1. Telah disampaikan Surat Sekda per triwulan kepada seluruh ASN untuk melakukan penyelesaian/penginputan SKP dalam aplikasi e-kinerja BKN 2. Melakukan penyelesaian Disparitas Data kinerja sekaligus rapat koordinasi dengan OPD terkait 3. Melakukan sosialisasi dengan narasumber dari BKN
	Dimensi Disiplin		4,99	5		1. Melakukan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan kepegawaian 2. Membuat Surat Edaran Walikota terkait Disiplin ASN

Sumber: Laporan Kinerja BKPSDM 2024

## 2. Nilai SAKIP BKPSDM

Sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diwakili oleh indikator Nilai SAKIP BKPSDM Kota Balikpapan memiliki realisasi yang fluktuatif dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Realisasi tersebut berturut -turut dari 2021 sampai dengan 2024 adalah 89.23, 89.95, 87.49 dan 87.69. .Berikut adalah perbandingan hasil evaluasi SAKIP 2023 yang dinilai pada tahun 2024:

Tabel 4. Nilai SAKIP BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2024

Komponen		Penilaian SAKIP 2023 di Tahun 2024	
No		Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	27,10
2	Pengukuran Kinerja	30	27,53
3	Pelaporan Kinerja	15	12,53
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	20,53
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	87,69
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Memuaskan	

Sumber: LHE Inspektorat Nomor 700/127/TIM-I/ITKOT

Terdapat beberapa kendala yang ditemui dalam pencapaian nilai SAKIP BKPSDM tahun 2024. Kendala tersebut diupayakan akan di perbaiki melalui rencana tindak lanjut evaluasi SAKIP.

Kendala berserta rencana tindak lanjut dalam pencapaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Kendala dan Rencana Tindak Lanjut Pencapaian Kinerja Nilai SAKIP BKPSDM

N o	Komponen	Kendala	Tindak Lanjut
1	Perencanaan	1. Pohon kinerja yang disusun sesuai dengan	1. Pohon kinerja BKPSDM digunakan dalam

N o	Komponen	Kendala	Tindak Lanjut
		<p>prinsip-prinsip penyusunan pohon kinerja belum secara optimal dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja dan digunakan untuk memetakan <i>cross cutting</i> antar bidang dan perangkat daerah.</p> <p>2. Belum optimalnya penyusunan rincian rencana aksi yang mendukung tercapainya PK.</p> <p>3. Belum optimalnya pemahaman dan kepedulian, komitmen pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan</p>	<p>perencanaan kinerja tahun 2024 yaitu sudah digunakan dalam perencanaan kinerja SKP dari Ess II sampai dengan staf/pelaksana. Sudah disusun <i>crosscutting</i> antar bidang maupun antar PD berdasarkan pohon kinerja.</p> <p>2. Akan disusun rencana aksi 2025 untuk mendukung pencapaian Perjanjian Kinerja 2025.</p> <p>3. Akan ditingkatkan monitoring dan evaluasi kinerja melalui rapat koordinasi internal BKPSDM.</p>
2	Pengukuran	Belum optimalnya pengukuran kinerja agar dilakukan secara berjenjang mulai dari eselon II sampai ke individual/ staf operasional dan didukung dengan eviden tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah diberikan.	Sudah dilakukan penginputan SKP yang berisi target kinerja dan realisasi kinerja beserta evidence pendukungnya pada aplikasi e kinerja BKN mulai dari Ess II sampai dengan staf/ pelaksana.
3	Pelaporan	<p>1. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi/ aplikasi dalam pelayanan kepegawaian dan terintegrasi secara menyeluruh dengan Perangkat Daerah.</p> <p>2. Belum optimalnya pencapaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya dengan dukungan basis data dan informasi mengenai kinerja yang dapat diandalkan</p>	<p>1. Pemanfaatan aplikasi SIMPEG untuk pelayanan kepegawaian berbasis digital dan terintegrasi dan akan terus dilakukan pengembangan SIMPEG untuk menambahkan dan jenis pelayanan kepegawaian yang ada.</p> <p>2. Perjanjian kinerja tahun selanjutnya ditetapkan melalui kesepakatan dan evaluasi terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya berdasarkan data dan infomasi melalui SIMPEG.</p>
4	Evaluasi Akuntabilitas	Belum optimalnya tindaklanjut hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya oleh Inspektorat sesuai rekomendasi yang disampaikan guna meningkatkan akuntabilitas kinerja internal	Koordinasi dan evaluasi untuk penyusunan rencana aksi tindak lanjut evaluasi AKIP tahun 2023.

Sumber: BKPSDM 2024

Analisis pencapaian kinerja pelayanan BKPSDM tahun 2021- 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Balikpapan

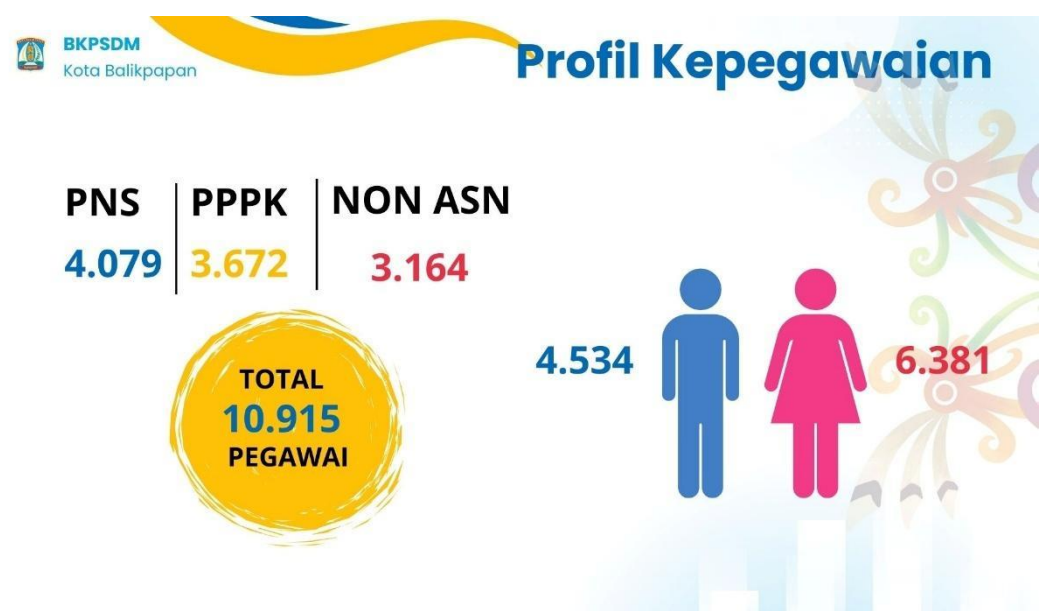
No	Indikator	SPM/	IKK	Target	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Rasio Capaian Pada		
		standar nasiona 1		Indikat or Lainnya	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Indeks Manajemen ASN	NSPK			60	70	80	90	100	61	73.5	72.68	1.02	1.05	0.91
2	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).		IKK		100.08	110.30	120.60	131.60	144.60	107.12	55.18	57.4	1.07	0.50	0.48
3	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).		IKK		12.70	14.6	16.4	18.3	20.2	20.16	24.65	23.1	1.59	1.69	1.41
4	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi.		IKK		89.4	93.3	101.9	105.4	11.2	59.39	34.04	36.6	0.66	0.36	0.36
5	Indeks Profesionalitas ASN			IKU	55	57	59	61	62	51.21	62.72	78.59	0.93	1.10	1.33
6	Niai SAKIP BKPSDM			IKU	-	89.75	90	90.25	90.56	89.23	87.49	87.69	NA	0.97	0.97

Sumber : BKPSDM Kota Balikpapan

2.1 Kelompok Sasaran Pelayanan BKSDM Kota Balikpapan

Kelompok sasaran pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) adalah seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan, termasuk pejabat struktural, fungsional, dan ASN di sekolah-sekolah negeri.

Berikut adalah gambaran besar ASN dan Non ASN di pemerintah Kota Balikpapan yang merupakan sasaran pelayanan dari BKPSDM Kota Balikpapan:



Gambar 8. Jumlah dan Komposisi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan

Sumber: Dapok BKPSDM 2025

2.1 Mitra BKSDM Kota Balikpapan Dalam Pemberian Pelayanan

Mitra BKPSDM Kota Balikpapan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam membantu BKPSDM dalam memberikan pelayanan kepada ASN dan masyarakat terkait manajemen ASN dan pengembangan SDM Kota Balikpapan. Adapun mitra BKPSDM dalam pemberian pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB). Kerja sama antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bertujuan untuk mempercepat dan menyelaraskan berbagai hal di bidang kepegawaian dan reformasi birokrasi di daerah. Kolaborasi ini mencakup pengadaan ASN, penataan non-ASN, layanan kepegawaian, hingga pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Balikpapan.
2. Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kerjasama BKN dengan BKPSDM Kota Balikpapan dalam pemberian layanan yaitu, penerapan sistem merit, penerapan manajemen talenta, pembinaan kepegawaian, pengendalian dan pengawasan serta layanan administrasi kepegawaian.
3. Korps Pegawai Republik Indonesia (KOPRPRI). Korpri melayani berbagai hal, terutama terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,

- penguatan ideologi dan karakter ASN, perlindungan karier dan bantuan hukum ASN, serta peningkatan kesejahteraan ASN;
4. Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara (PUSLATBANG KDOD LAN). Puslatbang KDOD LAN melayani beberapa hal utama, di antaranya adalah penyelenggaraan pelatihan, studi, dan analisis kebijakan terkait desentralisasi, otonomi daerah, dan reformasi birokrasi. Puslatbang KDOD LAN Samarinda merupakan lembaga yang seringkali berkerjasama dalam melakukan pendidikan pelatihan manajerial bagi ASN Kota Balikpapan;
  5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur . Organisasi ini memiliki beberapa layanan untuk ASN di Provinsi Kaltim yaitu pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi. BKPSDM Kota Balikpapan seringkali berkerjasama dalam pemberian pelayanan pendidikan dan pelatihan manajerial bagi ASN Kota Balikpapan.

2.1 Identifikasi Permasalahan BKPSDM Kota Balikpapan

Analisis permasalahan merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Perumusan permasalahan BKPSDM Kota Balikpapan diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi perangkat daerah di masa lima tahun mendatang.

Merujuk kepada hasil analisis permasalahan pembangunan daerah per-urusan pemerintahan pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029, maka terdapat permasalahan terkait BKPSDM Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Gambar 9. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya implementasi sistem merit pada aparatur birokrasi Kota Balikpapan.	Belum optimalnya nilai pada 8 (delapan) aspek sistem merit.	Berdasarkan surat keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara No. 268/KEP.KASN/C/XI/2023 Tentang Penetapan Kategori Penilaian dan Indeks Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan meraih skor 280,5 dan indeks 0,68 dengan predikat “Baik”. Untuk mencapai nilai optimal sampai dengan 410, terdapat beberapa permasalahan aspek sistem merit yang perlu ditindaklanjuti yaitu: <div><div>1.</div><div>Belum ditetapkannya pola karir dikarenakan peraturan kepala daerah tentang pola karir instansi belum disahkan.</div></div> <div><div>2.</div><div>Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) belum disusun secara menyeluruh. SKJ baru disusun sebagian yaitu pada tataran Jabatan Tinggi Pratama (JPT).</div></div> <div><div>3.</div><div>Belum dilaksanakannya promosi dan mutasi dengan mengacu pada <i>talent pool</i> dan rencana suksesi.</div></div>



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<div>4. Belum dilakukannya pembinaan kinerja (coaching, mentoring,konseling) secara berkala.</div> <div>5. Belum disahkannya peraturan kepala daerah berbasis kinerja seperti bentuk pemberian penghargaan berbasis kinerja</div> <div>6. Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) perlu menunjukkan integrasi dua arah dengan sistem penilaian kinerja (e kinerja) dan pembinaan kepegawaian (e kompetensi).</div> <div>7. e-kinerja belum terintegrasi dengan pengembangan karir. Agar menunjukkan penggunaan e-kinerja untuk penilaian kinerja pegawai Demo e-kinerja</div>

Sumber: RPJMD Kota Balikpapan 2025-2029 dan surat keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara No. 268/KEP.KASN/C/XI/2023.

2.1 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.1.1 Visi

Pernyataan visi Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 Kota Balikpapan merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Perumusan visi RPJMD berdasarkan visi kepala daerah terpilih. Visi Kepala Daerah Kota Balikpapan merupakan landasan utama dalam merumuskan berbagai kondisi pendukung, baik pada level misi, tujuan, sasaran, hingga program prioritas daerah. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 adalah:

***”Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman”***

**Kota global** merujuk pada kondisi yang mencerminkan Kota Balikpapan yang maju, modern, tangguh, inovatif, dan setara dengan kemajuan kota besar yang ada didunia. Kota global juga mencerminkan kesinambungan pembangunan yang semakin progresif diberbagai bidang seperti ekonomi, infrastruktur, sosial budaya, lingkungan, dan pelayanan publik. Kota Balikpapan sendiri memiliki posisi dan peran penting dalam pembangunan regional, nasional, maupun global. Balikpapan mendukung peran pembangunan wilayah Pulau Kalimantan sebagai *Superhub* Ekonomi Nusantara untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di kawasan Timur Indonesia. Sebagai Kawasan Perkotaan Besar, Kota Balikpapan juga memiliki peran besar terhadap pusat perdagangan barang dan jasa, serta industri yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

**Nyaman untuk semua** mencerminkan upaya menciptakan lingkungan, layanan, dan kebijakan yang dapat dinikmati dan diakses oleh semua kalangan tanpa memandang latar belakang, fisik, usia, dan status sosial. Nyaman untuk semua bertujuan untuk memastikan pembangunan berjalan secara inklusif yang berfokus pada kenyamanan dan aksesibilitas bagi setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk semua juga merujuk pada realitas sosiokultural bahwa masyarakat Balikpapan yang cukup heterogen

dan multikultur, sehingga menjadikan Kota Balikpapan sebagai kota milik bersama yang inklusif, damai dan kondusif.

**Madinatul Iman** merujuk kepada aspek spiritualitas yang mewarnai seluruh aktivitas penduduk Kota Balikpapan. Sebagai aspek spiritual, konsep madinatul iman memiliki lima prinsip sebagai berikut:

1. Spiritualitas menjadi roh dari seluruh kegiatan masyarakat;
2. Manusia dengan spiritualitas menjadi pusat pembangunan;
3. Seluruh masyarakat ikut terlibat aktif dalam perencanaan dan implementasi rencana kota;
4. Transparansi dalam seluruh kegiatan masyarakat dan pemerintah;
5. Kolaborasi/kerjasama lebih diprioritaskan daripada kompetisi disegala aspek kehidupan.

**3.1.1 Misi**

Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah, maka ditetapkan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 adalah:

1. Membangun dan mengembangkan Pemerintah yang bersih dan profesional berorientasi pada pelayanan masyarakat;
2. Membangun dan mengembangkan infrastruktur terpadu yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat Kota;
3. Membangun dan mengembangkan kehidupan sosial yang kondusif untuk menciptakan masyarakat sehat yang terdidik;
4. Mengembangkan perekonomian yang tumbuh berkeadilan untuk semua;
5. Konsisten menjaga lingkungan hidup yang sehat dan nyaman untuk semua.

Tugas BKPSDM Kota Balikpapan terkait dengan misi ke-1 (satu) yaitu Membangun dan mengembangkan Pemerintah yang bersih dan profesional berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dibawah ini akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Visi: <i>Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman</i>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Pendorong
1.	Misi 1 Membangun dan mengembangkan Pemerintah yang bersih dan profesional berorientasi pada pelayanan masyarakat	Belum optimalnya implementasi sistem merit pada aparatur birokrasi Kota Balikpapan.	1. Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) belum disusun secara menyeluruh. SKJ baru disusun sebagian yaitu pada tataran Jabatan Tinggi Pratama (JPT);	1. Komitmen Pemerintah Pusat dan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan sistem merit sebagaimana diamanahkan dalam UU ASN;
	Program prioritas: Penataan Sistem Manajemen Sdm Aparatur (Meritokrasi ASN)		2. Belum dilaksanakannya promosi dan mutasi dengan mengacu pada <i>talent pool</i> dan rencana suksesi; 3. Belum ditetapkannya pola karir dikarenakan	2. BKPSDM secara kelembagaan telah memiliki fungsi kelembagaan untuk

<b>Visi:</b> <b>Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman</b>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			peraturan kepala daerah tentang pola karir instansi belum disahkan; 4. Belum dilakukannya pembinaan kinerja ( <i>coaching, mentoring, konseling</i> ) secara berkala; 5. Belum disahkannya peraturan kepala daerah berbasis kinerja seperti bentuk pemberian penghargaan berbasis kinerja; 6. Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) perlu menunjukan integrasi dua arah dengan sistem penilaian kinerja (e kinerja) dan pembinaan kepegawaian (e kompetensi).	mengawal dan mengawasi pelaksanaan manajemen ASN berbasis meritokrasi di Pemerintah Kota Balikpapan. 3. Telah disusun peraturan kepala daerah tentang pelaksanaan manajemen talenta. 4. Sebagian layanan kepegawaian telah berbasis digital untuk pelaksanaan sistem merit.

## 2.1 Telaahaan Rancangan Renstra Kementrian/ Lembaga

### 3.1.1 Telahaan Rancangan Renstra Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Rancangan Renstra BKN Tahun 2025- 2029, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN Tahun 2025-2029, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan Asta Cita Presiden dan wakil presiden periode 2025-2029.

Visi BKN untuk tahun 2025-2029, mengacu kepada misi pembangunan nasional tahun 2025-2029 atau Asta Cita ke 7 (tujuh), yaitu “*Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan*“. Visi BKN yaitu **”Terwujudnya Meritokrasi dan Profesionalitas ASN dalam Rangka Mendukung Visi Presiden, Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”** adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran BKN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan itu disusun untuk mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2025-2045.

Visi BKN selanjutnya diturunkan ke dalam misi BKN yang disusun berdasarkan ketentuan tugas dan fungsi BKN terkait ASN dan meritokrasi ASN. Berikut adalah misi yang diemban oleh BKN pada tahun 2025- 2029:

1. Memastikan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di instansi pemerintah melalui kebijakan teknis, pembinaan, advokasi, pelayanan kepegawaian, dan penjaminan kualitas meritokrasi;
2. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan dan governansi internal BKN.

Adapun tujuan dan sasaran beserta target kinerja BKN tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.Sasaran Strategis BKN Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline (2024)	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya kapabilitas instansi Pemerintah dalam manajemen ASN dan profesionalitas ASN berbasis meritokrasi .	Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan implementasi manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi minimal berkategori baik	51,80%	51,80%	54,93%	58,06%	61,19%	64,32%
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan BKN yang lincah, profesional, dan akuntabel serta berbasis digital	Nilai Reformasi Birokrasi BKN	89,75	89,75	90,25	90,50	90,75	91,00

Sumber: Rancangan Renstra BKN 2025- 2029

Dibawah ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Rancangan Renstra BKN.

Tabel 8. Permasalahan Pelayan BKPSDM Berdasarkan Sasaran Rancangan Renstra BKN Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan	Sebagai Faktor	
		Pelayanan OPD	Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kapabilitas instansi Pemerintah dalam manajemen ASN dan profesionalitas ASN berbasis meritokrasi.	Belum optimalnya nilai pada 8 (delapan) aspek sistem merit.	<div><div>1.</div><div>2.</div><div>3.</div><div>4.</div><div>5.</div><div>6.</div></div> Belum ditetapkan polanya pola karir dikarenakan peraturan kepala daerah tentang pola karir instansi belum disahkan; Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) belum disusun secara menyeluruh. SKJ baru disusun sebagian yaitu pada tataran Jabatan Tinggi Pratama (JPT); Belum dilaksanakannya promosi dan mutasi dengan mengacu pada <i>talent pool</i> dan rencana suksesi; Belum dilakukannya pembinaan kinerja ( <i>coaching, mentoring,konseling</i> ) secara berkala; Belum disahkannya peraturan kepala daerah berbasis kinerja seperti bentuk pemberian penghargaan berbasis kinerja; Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) perlu menunjukkan integrasi dua arah dengan sistem penilaian kinerja (e kinerja) dan pembinaan kepegawaian (e kompetensi).	<div><div>1.</div><div>2.</div><div>3.</div><div>4.</div></div> Komitmen Pemerintah Pusat dan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan sistem merit sebagaimana diamanahkan dalam UU ASN; BKPSDM secara kelembagaan telah memiliki fungsi kelembagaan untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan manajemen ASN berbasis meritokrasi di Pemerintah Kota Balikpapan. Telah disusun peraturan kepala daerah tentang pelaksanaan manajemen talenta. Sebagian layanan kepegawaian telah berbasis digital untuk pelaksanaan sistem merit.
		Belum optimalnya Indeks profesionalitas ASN	<div><div>1.</div><div>2.</div><div>3.</div></div> Masih adanya kesenjangan kompetensi ASN dari syarat jabatannya sebesar 12,57 dari nilai total dimensi kompetensi sebesar 40. Masih adanya kesenjangan kualifikasi sebesar 3,83 dari nilai total dimensi kualifikasi sebesar 25; Masih adanya ASN yang berkinerja dibawah predikat “baik”. Kesenjangan kinerja sebesar 5,01 dari total nilai dimensi kinerja sebesar 30	<div><div>1.</div><div>2.</div><div>3.</div></div> Komitmen Pemerintah Pusat dan Kepala Daerah dalam peningkatan kualitas ASN; BKPSDM secara kelembagaan telah memiliki fungsi untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan peningkatan profesionalitas ASN di Pemerintah Kota Balikpapan; Tingginya minat/ kesadaran ASN dalam peningkatan kualifikasi pendidikan melalui tugas belajar yang dibiayai APBD maupun secara mandiri.

2.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan perangkat daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka perangkat daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, perangkat daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah:

- 1. Rencana struktur tata ruang;
- 2. Struktur tata ruang saat ini;
- 3. Rencana pola ruang;
- 4. Pola ruang saat ini; dan
- 5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

Penelaahaan RTRW Kota Balikpapan dilaksanakan dalam rangka penyusunan RPJMD Kota Balikpapan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Dari penelaahan tersebut , tidak ada implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Tabel 9. Permasalahan Pelayanan BKPSDM Kota Balikpapan berdasarkan Telaahan Rencana Pola Ruang RTRW beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Pola Ruang RTRW terkait Tugas dan Fungsi BKPSDM	Permasalahan Pelayanan BKPSDM Kota Balikpapan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Dokumen KLHS memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,rencana dan atau program. Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Program kota yang diturunkan menjadi program Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah telah dianalisis dalam Dokumen Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada tahap Rancangan RPJMD. Alternatif dan rekomendasi yang diberikan oleh dokumen KLHS telah ditindaklanjuti dalam dokumen RPJMD Kota Balikpapan. Namun demikian, KLHS tidak memberikan alternatif dan rekomendasi terhadap program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

**Tabel 10. Tabel 9. Permasalahan Pelayanan BKPSDM Kota Balikpapan berdasarkan Telaahan KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi BKPSDM	Permasalahan Pelayanan BKPSDM Kota Balikpapan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

**2.1 Penentuan Isu- isu Strategis**

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, penelaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan penelaahan Renstra BKN, penelaahan terhadap RTRW Kota Balikpapan serta KLHS Kota Balikpapan, maka dirumuskan beberapa isu strategis BKPSDM Kota Balikpapan 2025- 2029 yang telah disesuaikan dengan lingkungan dinamis (global, nasional dan regional):

**Tabel 11. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis**

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD  (1)	Permasalahan PD  (2)	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD  (3)	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD  (7)
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
			(4)	(5)	(6)	
<b>ASN Kota Balikpapan</b>	Belum optimalnya manajemen ASN berbasis sistem merit	Nihil 1	Perkembangan teknologi	Asta Cita Prioritas 7, yaitu :Penerapan prinsip meritokrasi melalui peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja, penguatan manajemen talenta ASN, penerapan pengembangan kompetensi ASN yang mendorong kemudahan akses belajar, digitalisasi manajemen ASN, penerapan budaya kerja yang mendorong peningkatan integritas ASN serta penerapan dan evaluasi kebijakan manajemen ASN	RPJMD Kota Balikpapan: Isu Strategis 6: Peningkatan manajemen aparatur sipil negara (ASN), terutama dalam kebijakan promosi dan mutasi ASN yang harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan mendukung sistem akuntabilitas daerah.	Meningkatkan manajemen ASN yang berbasis sistem merit
	Belum Optimalnya peningkatan profesionalitas ASN	Nihil 1	Perkembangan teknologi	Renstra BKN: Perkembangan teknologi . Diperlukan dukungan kompetensi ASN dalam hal data analitis, teknologi serta komunikasi. Merujuk pada dimensi kompetensi dan dimensi kinerja yang nilainya belum optimal	RPJMD Kota Balikpapan: Misi 1: Peningkatan profesionalitas ASN untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan kompetensi ASN	Peningkatan profesionalitas ASN



BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

2.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Visi dan Misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai pada masa mendatang.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan tahun 2025 2029 memuat visi misi sebagai berikut;



Gambar 10. Visi Misi Kota Balikpapan 2025- 2029

Sumber : Rankhir RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

BKPSDM dalam menjalankan urusannya di bidang penunjang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia yang menjalankan Pemerintahan di Kota Balikpapan, masuk ke dalam misi ke 1 (satu) yaitu **Membangun dan mengembangkan Pemerintah yang bersih dan profesional berorientasi pada pelayanan masyarakat.**

Pemerintahan yang bersih menjadi landasan utama untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Kota Balikpapan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik, setiap kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat.

Profesionalitas ASN menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik. BKPSDM memiliki peran pada sebagai mitra strategis pembangun kapabilitas dan peningkatan kinerja ASN. Hal tersebut berdampak pada pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, efektif, dan efisien. Dari hal tersebut masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah yang benar-

benar berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat maupun kemajuan daerah.

### 3.1.1 Tujuan

Tujuan dan sasaran merupakan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Renstra BKPSDM Kota Balikpapan 2025- 2029. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Tujuan perangkat daerah ditetapkan dengan mengacu kepada sasaran RPJMD Kota Balikpapan 2025- 2029 dengan memerhatikan permasalahan dan isu-isu strategis urusannya bidang penunjang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia.

Rumusan sasaran RPJMD Kota Balikpapan 2025- 2029 yang selaras dengan BKPSDM adalah **"Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas"**. Percepatan pembangunan kota menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan Pemerintah Kota Balikpapan. Peran internal pemerintah kota Balikpapan merupakan hal yang sangat penting. Akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah ditunjang oleh peran birokrasi pemerintah yang kuat.

Tantangan utama saat ini adalah memperkuat pertanggungjawaban kinerja pemerintahan. Oleh karena itu, kerja sama antarperangkat daerah, khususnya di bidang perencanaan, pengawasan, kepegawaian, dan koordinasi kebijakan, perlu ditingkatkan untuk memperkuat efektivitas organisasi serta menghubungkan capaian kinerja organisasi dengan kontribusi individu. Selain itu, peningkatan manajemen aparatur sipil negara (ASN) menjadi hal krusial, terutama dalam kebijakan promosi dan mutasi ASN yang harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan mendukung sistem akuntabilitas daerah.

Pada RPJMD Kota Balikpapan, sasaran ini ditunjang oleh beberapa indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP daerah dan Indeks Integritas Pemerintah. Nilai SAKIP daerah didalam Rankhir RPJMD Kota Balikpapan 2025 -2029 didukung oleh 2 (dua) program prioritas yaitu;

1. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (ASN) dan;
2. Optimalisasi SPIP.

Program prioritas yang selaras dengan BKPSDM adalah Sistem Manajemen SDM Aparatur (ASN). Secara kelembagaan yang diamanahkan Pemerintah Kota Balikpapan kepada BKPSDM, penataan manajemen ASN akan dilaksanakan melalui sistem merit. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan yang akan diemban oleh BKPSDM adalah **"Meningkatnya aparatur birokrasi yang kapabel melalui penerapan sistem merit ASN"**

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten merupakan salah satu modal penting dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berbangsa dan bernegara. Fungsi ASN di pemerintah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa telah menjadi sentral dalam penentu keberhasilan pencapaian target pembangunan.

Untuk itu, manajemen ASN menjadi hal yang perlu menjadi perhatian serius mulai dari perencanaan hingga pemberhentian.

Pembangunan manajemen Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas dan netral sejatinya telah dimulai sejak kebijakan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara diamanatkan oleh Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara adalah dasar hukum yang dengan tegas mengamankan bahwa instansi pemerintah harus menerapkan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara.

Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Pengukuran keberhasilan dari tujuan tersebut adalah dengan meningkatnya indeks sistem merit. Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah.

Perhitungan indeks sistem merit didasarkan pada Permen PAN RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. Adapun perhitungan indeks sistem merit menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks Merit Sistem} = \frac{\sum (\text{Skor Bobot dalam setiap aspek})}{(\text{Skor maksimal} \times \text{bobot maksimal})}$$

Gambar 11. Rumus Perhitungan Indeks Sistem Merit

Sumber: Permen PAN RB Nomor 40 Tahun 2018

Aspek yang terdapat dari indeks sistem merit adalah sebagai berikut:

- 1. Perencanaan Kebutuhan;
- 2. Pengadaan;
- 3. Pengembangan karier;
- 4. Promosi dan mutasi
- 5. Manajemen Kinerja
- 6. Penggajian, penghargaan dan disiplin;
- 7. Perlindungan dan pelayanan;
- 8. Sistem Informasi.

Sebagai tindak lanjut Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 4 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, BKN kini menjadi *leading sector* dalam pengawasan pelaksanaan sistem merit yang dahulu diemban oleh Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Lebih lanjut berdasarkan hasil koordinasi kepada pihak BKN, saat ini tengah di lakukan pembahasan formulasi ulang mengenai instrumen penilaian sistem merit. Kemungkinan terjadinya perubahan formulasi

penilaian sistem merit akan berimbang kepada target kinerja tujuan BKPSDM yaitu indeks sistem merit.

3.1.1 Sasaran

Upaya pencapaian tujuan BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029 , didukung oleh 2 (dua) sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN

Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Standar Profesionalitas ASN adalah kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Pengukuran Indeks Profesionalitas berdasarkan Peraturan KN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 17 Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN merupakan jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$
$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$
$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$
$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$
$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Gambar 12. Rumus Perhitungan IP ASN  
Sumber: Perka BKN Nomor 8 Tahun 2019

Keterangan:

- IP= Indeks Profesionalisme
- IPi= Indeks Profesionalisme ke-i
- IP 1= Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
- IP 2= Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
- IP 3= Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
- IP 4= Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$  = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j \* Rating Jawaban indikator  
Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$  = Bobot indikator Kualifikasi ke-k \* Rating Jawaban indikator  
Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$  = Bobot indikator Kualifikasi ke-l \* Rating Jawaban indikator  
Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$  = Bobot indikator Kualifikasi ke-m \* Rating Jawaban indikator  
Kualifikasi ke-m

- a. Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS (pegawai Negeri Sipil) dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah, dan diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Keseluruhan Pengukuran. Instrumen Pengukuran pada dimensi kualifikasi bobot penilaian, menurut peraturan ini adalah:
1. Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-3 (Stara Tiga);
  2. Bobot nilai sebesar 20 (dua puluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-2 (Stara Dua);
  3. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-1 (Stara Satu)/D-IV (Diploma Empat);
  4. Bobot Nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-III (Diploma Tiga);
  5. Bobot Nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/Sederajat; dan
  6. Bobot NILAI sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memperoleh/memiliki Pendidikan dibawah SLTA.
- b. Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dan diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya.
- Instrumen Pengukuran pada diklat kepemimpinan bobot penilaiannya, adalah:
1. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki;
  2. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki.

Adapun instrumen Pengukuran pada diklat fungsional bobot penilaiannya, menurut peraturan ini adalah:

1. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki;

2. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki

Instrumen pengukuran pada diklat teknis paling sedikit 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dengan bobot penilaian sebagai berikut:

1. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya
2. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;
3. Bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir;
4. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Untuk instrumen pengukuran pada seminar/workshop/kursus/magang/ sejenisnya dengan bobot penilaian sebagai berikut:

1. Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti seminar/workshop/ kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  2. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti seminar/workshop/ kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  3. Bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  4. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- c. Dimensi Kinerja, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS, dan diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot, penilaiannya adalah:

5. Bobot nilai sebesar 30 (tiga puluh) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) dengan kriteria sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  6. Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dengan kriteria baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  7. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dengan kriteria cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  8. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) dengan kriteria sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  9. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja 50 (lima puluh) ke bawah dengan kriteria kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- d. Instrumen Pengukuran pada dimensi disiplin bobot penilaiannya sebagai berikut:
1. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
  2. Bobot nilai sebesar 3 (tiga) bagi PNS yang memiliki Riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
  3. Bobot nilai sebesar 2 (dua) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;
  4. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

## 2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BKPSDM Kota Balikpapan yang diwakili oleh indikator Nilai SAKIP BKPSDM Kota Balikpapan.

Nilai SAKIP BKPSDM didapat dari Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat berpedoman pada Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evalusi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun nilai SAKIP perangkat Daerah akan didapat melalui pengkuran sebagai berikut:

N o	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30
2	Pengukuran Kinerja	30
3	Pelaporan Kinerja	15
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25
	Nilai Hasil Evaluasi	<b>100%</b>

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini.



Tabel 12. Tujuan Jangka Menengah BKPSDM Kota Balikpapan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel			Nilai SAKIP Daerah	69,4	69,74	70,08	70,42	70,77		
	Meningkatnya aparatur birokrasi yang kapabel melalui penerapan Sistem Merit Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Balikpapan		Indeks Sistem Merit	0,69	0,7	0,71	0,72	0,73	0,74	
		Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	79	79,5	79,8	80	80,2	80,5	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP OPD	89,01	89,05	89,08	89,09	90,05	90,08	

**2.1 Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dengan memerhatikan atau sebagai jawaban/solusi atas (analisis) permasalahan dan isu strategis tugas dan fungsi BKPSDM dalam mendukung pemerataan layanan urusan penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Strategi dan arah kebijakan Renstra BKPSDM juga diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kota Balikpapan.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Untuk mengetahui langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan salah satunya dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan ancaman atau hambatan (threats). Dalam hal ini kekuatan dan kelemahan merupakan aspek penilaian terhadap faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman merupakan aspek penilaian dari faktor eksternal. Berikut disajikan tabel analisis SWOT dalam menentukan strategi dan arah kebijakan BKPSDM 2025 -2029;

**Tabel 13. Penentuan Alternatif Strategi BKPSDM 2025- 2029**

<div>Faktor Eksternal</div> <div>Faktor Internal</div>	<b>Peluang / Opportunities</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Komitmen Kepala Daerah Balikpapan dalam peningkatan akuntabilitas di semua Perangkat Daerah</li><li>• Asta Cita Prioritas 7 tentang Pelaksanaan Sistem Merit</li><li>• Transformasi Digital mempercepat layanan manajemen ASN</li></ul>	<b>Ancaman/ Threats</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• isruptif teknologi</li><li>• Ancaman keamanan data dan informasi</li></ul>
<b>Kekuatan / Strenght</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kewenangan dalam Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan</li><li>• Tersedianya Peraturan dan SOP bidang urusan penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan</li><li>• Ketersediaan data dan informasi kepegawaian berbasis digital</li><li>• Nilai SAKIP BKPSDM sudah mendapat predikat A “Memuaskan” dengan nilai 86,79</li></ul>	<b>Alternatif strategi:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Optimalisasi kualitas SAKIP BKPSDM</li><li>• Optimalisasi digitalisasi manajemen ASN termasuk interoperabilitas sistem informasi ASN</li></ul>	<b>Alternatif strategi:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Optimalisasi digitalisasi dan kemanan data dan informasi manajemen ASN</li></ul>
<b>Kelemahan/ Weakness</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Capaian indeks sistem merit Kota Balikpapan baru mencapai kategori <b>Baik</b> dengan nilai 280,5 indeks 0,68</li><li>• Capaian indeks profesionalitas ASN baru mecapai predikat <b>Sedang</b> dengan nilai indeks 78,59</li><li>• Belum meratanya jumlah ASN yang berkompeten terkait data analitis,teknologi dan komunikasi.</li><li>• Pohon kinerja BKPSDM belum seluruhnya disusun atas prinsip-prinsip Permenpan Nomor 89 Tahun 2021</li></ul>	<b>Alternatif strategi:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan manajemen ASN berdasarkan sistem merit dengan penekanan penerapan manajemen talenta</li></ul>	<b>Alternatif strategi:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan ASN yang Profesional</li></ul>

Dari analisis terhadap faktor internal dan eksternal serta memperhatikan sasaran kota, strategi dan arah kebijakan kota, maka didapatkan sejumlah strategi sebagai berikut:

Tabel 14. Penahapan Renstra BKPSDM 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan manajemen ASN berdasarkan sistem merit dengan penekanan penerapan manajemen talenta	Peningkatan manajemen ASN berdasarkan sistem merit	Peningkatan manajemen ASN berdasarkan sistem merit	Peningkatan manajemen ASN berdasarkan sistem merit	Peningkatan manajemen ASN berdasarkan sistem merit
Peningkatan ASN yang Profesional	Peningkatan ASN yang Profesional	Peningkatan ASN yang Profesional	Peningkatan ASN yang Profesional	Peningkatan ASN yang Profesional
Optimalisasi digitalisasi dan kemandirian data dan informasi manajemen ASN	Optimalisasi digitalisasi dan kemandirian data dan informasi manajemen ASN	Optimalisasi digitalisasi dan kemandirian data dan informasi manajemen ASN	Optimalisasi digitalisasi dan kemandirian data dan informasi manajemen ASN	Optimalisasi digitalisasi dan kemandirian data dan informasi manajemen ASN
Optimalisasi kualitas SAKIP BKPSDM	Optimalisasi kualitas SAKIP BKPSDM	Optimalisasi kualitas SAKIP BKPSDM	Optimalisasi kualitas SAKIP BKPSDM	Optimalisasi kualitas SAKIP BKPSDM

1. Strategi untuk Peningkatan manajemen ASN berdasarkan sistem merit dengan penekanan penerapan manajemen talenta dengan arah kebijakan sebagai berikut:
  - a. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan PPK dengan acuan peta jabatan;
  - b. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan secara menyeluruh;
  - c. Penyusunan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi;
  - d. Pembaharuan database SIMPEG dan Pengintegrasian dengan aplikasi Manajemen Talenta;
  - e. Penerapan manajemen talenta;
  - f. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui *coaching* dan mentoring;
  - g. *Assesment* ASN
  - h. Penetapan kebijakan Kepala Daerah tentang pola karir;
  - i. Pelaksanaan pemberian Penghargaan ASN berdasarkan peraturan kepala daerah tentang pemberian penghargaan;
  - j. Pembangunan *Assesment Center*
2. Strategi untuk peningkatan Indeks Profesionalitas ASN akan dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan perhitungan indeks penilaian ASN berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara ;
  - b. Pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui pelatihan untuk ASN melalui metode klasikal dan non klasikal;
  - c. Optimalisasi pengembangan kompetensi berbasis elektronik (*e learning*);
  - d. Pengembangan kompetensi ASN dalam bidang STEM (*Science, Technology, Engineering, Mathematics*);
  - e. Pemberian Fasilitas tugas belajar baik pembiayaan APBD / Mandiri / lain-lain;
  - f. Fasilitas Pencantuman gelar akademik yang sesuai ketentuan;
  - g. Melaksanakan penyelesaian disparitas data kinerja;
  - h. Diseminasi peraturan kepegawaian;
  - i. Pembinaan Disiplin pegawai.
3. Strategi untuk optimalisasi kualitas SAKIP BKPSDM akan dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut:
  - a. Penyusunan pohon kinerja sesuai Permenpan Nomor 89 Tahun 2021;
  - b. Peningkatan pemahaman, kepedulian dan komitmen pegawai BKPSDM dalam pencapaian kinerja dalam rangka peningkatan akuntabilitas BKPSDM.
4. Strategi untuk Optimalisasi digitalisasi dan kemandirian data dan informasi manajemen ASN akan dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut:
  - a. Pengembangan dan pemeliharaan layanan administrasi kepegawaian berbasis digital (Optimalisasi SIMPEG).

Berikut adalah arah kebijakan renstra BKPSDM yang sesuai dengan tugas dan fungsi serta selaras dengan RPJMD ;

**Tabel 15. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra BKPSDM**

No (1)	Operasionalisasi NSPK (2)	Arah Kebijakan RPJMD (3)	Arah Kebijakan Renstra BKPSDM (4)	Ket (5)
1	Perencanaan Kebutuhan		Penyusunan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan PPK dengan acuan peta jabatan;	
			Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan secara menyeluruh	
2	Pengembangan Karier		Penyusunan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi	
			Pembaharuan database SIMPEG dan Pengintegrasian dengan aplikasi Manajemen Talenta	
			Penerapan manajemen talenta	
			Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring	

No (1)	Operasionalisasi NSPK (2)	Arah Kebijakan RPJMD (3)	Arah Kebijakan Renstra BKPSDM (4)	Ket (5)
			Assesment ASN	
3	Promosi Mutasi		Penetapan kebijakan Kepala Daerah tentang pola karir	
4	Penggajian Penghargaan dan Disiplin		Pelaksanaan pemberian Penghargaan ASN berdasarkan peraturan kepala daerah tentang pemberian penghargaan	
5	Sistem Informasi		Pembangunan Assesment Center berbasis teknologi Informasi	
6	Indeks Profesionalitas ASN	Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional	Pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan perhitungan indeks penilaian ASN berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	
			Pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui pelatihan untuk ASN melalui metode klasikal dan non klasikal	
			Optimalisasi pengembangan kompetensi berbasis elektronik (e learning)	
			Pengembangan kompetensi ASN dalam bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics);	
			Pemberian Fasilitas tugas belajar baik pembiayaan APBD / Mandiri / lain-lain	
			Fasilitasi Pencantuman gelar akademik yang sesuai ketentuan	
			Melaksanakan penyelesaian disparitas data kinerja	
			Diseminasi peraturan kepegawaian	
			Pembinaan Disiplin Pegawai	
	SAKIP	Perbaikan tata kelola kelembagaan dan birokrasi	Penyusunan pohon kinerja sesuai Permenpan Nomor 89 Tahun 2021	
			Peningkatan pemahaman, kepedulian dan komitmen pegawai BKPSDM dalam pencapaian kinerja dalam rangka peningkatan akuntabilitas BKPSDM	
	Sistem Informasi Kepegawaian	Pengembangan SPBE untuk meningkatkan kualitas pelayanan	Pengembangan dan pemeliharaan SIMPEG	

**BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Program Perangkat Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Rancangan Akhir RPJMD, selanjutnya dijabarkan Perangkat Daerah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Program prioritas Perangkat Daerah didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan 2025- 2029, maka program-program yang menjadi kewenangan BKPSDM Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

**Tabel 16. Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KE T.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya aparatur birokrasi yang kapabel melalui penerapan Sistem Merit Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Balikpapan	Meningkatnya profesionalitas ASN			Indeks Profesionalitas ASN	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	
						<b>Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	
						Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	
						Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
						Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	
						Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KE T.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
						Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	
						<b>KegiatanMutasi dan Promosi ASN</b>	
						Pengelolaan Mutasi ASN	
						Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
						Pengelolaan Promosi ASN	
						<b>Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN</b>	
						Pengelolaan Assessment Center	
						Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	
						Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	
						<b>Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	
						Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
						Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	
						Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	
						Pembinaan Disiplin ASN	
						Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	
						Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	
						<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KE T.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<b>Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	
						Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
						<b>Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	
						Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
	Meningkatnya aparatur birokrasi yang kapabel melalui penerapan Sistem Merit Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Balikpapan	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan			Nilai AKIP OPD	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	
						<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KE T.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KE T.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
						<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KE T.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

Berikut ditampilkan tabel terkait Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BKPSDM 2025-2029;

Tabel 17. Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT (02)	BASELINE TAHUN 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN (14)
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
BKPSDM				22,764,999,000		23,447,949,000		24,620,346,000		25,112,753,000		25,866,136,000	
5.03 - KEPEGAWAIAN				20,571,609,525		19,564,193,999		20,266,530,143		19,753,461,680		20,396,767,091	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A				14,728,259,223		10,539,475,440		11,089,401,346		12,646,725,741		12,062,517,737	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	83	83,25	14,728,259,223	83,5	10,539,475,440	83,75	11,089,401,346	84	12,646,725,741	84,25	12,062,517,737	
5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		12,644,399		12,948,065		14,373,401		13,346,751	
Terlaksananya IKM Layanan Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	-	2	12,644,399	2	12,948,065	3	14,373,401	2	13,346,751	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT (02)	BASELINE TAHUN 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN (14)
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4		
5.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		7,644,399		7,948,065		9,373,401		8,346,751	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	0	2	7,644,399	2	7,948,065	3	9,373,401	2	8,346,751	
5.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	0	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	
5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12,147,741,000		7,646,700,597		8,026,036,384		9,132,362,956		8,692,066,259	
Terlaksananya Layanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60	65	12,147,741,000	64	7,646,700,597	64	8,026,036,384	64	9,132,362,956	64	8,692,066,259	
5.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12,147,741,000		7,646,700,597		8,026,036,384		9,132,362,956		8,692,066,259	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60	65	12,147,741,000	64	7,646,700,597	64	8,026,036,384	64	9,132,362,956	64	8,692,066,259	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT  (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT  (02)	BASELINE TAHUN 2024  (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN  (14)
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
5.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				634,356,000		709,087,050		744,269,336		846,854,233		806,025,028	
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	60	65	634,356,000	65	709,087,050	65	744,269,336	65	846,854,233	65	806,025,028	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	65		64		64		64		64		
5.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				74,646,000		99,943,104		104,901,958		119,360,912		113,606,190	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	65	74,646,000	64	99,943,104	64	104,901,958	64	119,360,912	64	113,606,190	
5.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				559,710,000		609,143,946		639,367,378		727,493,321		692,418,838	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	60	65	559,710,000	65	609,143,946	65	639,367,378	65	727,493,321	65	692,418,838	
5.03.01.2.06 - Administrasi				961,761,823		1,186,676,893		1,252,433,997		1,432,247,650		1,369,451,551	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT (02)	BASELINE TAHUN 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN (14)
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Umum Perangkat Daerah													
Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	90	88	961,761,823	90	1,186,676,893	90	1,252,433,997	90	1,432,247,650	90	1,369,451,551	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	5		5		5		5		5		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	3		7		7		7		7		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	13		10		10		10		10		
5.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				205,158,056		252,887,990		265,435,341		302,021,098		287,459,818	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	5	205,158,056	5	252,887,990	5	265,435,341	5	302,021,098	5	287,459,818	
5.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				413,392,041		518,420,379		544,142,449		619,143,251		589,292,753	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT  (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT  (02)	BASELINE TAHUN 2024  (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN  (14)
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	13	413,392,041	10	518,420,379	10	544,142,449	10	619,143,251	10	589,292,753	
5.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				52,915,750		51,842,038		54,414,245		61,914,505		58,929,576	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	3	52,915,750	7	51,842,038	7	54,414,245	7	61,914,505	7	58,929,576	
5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				290,295,976		363,526,486		388,441,962		449,168,796		433,769,404	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	90	88	290,295,976	90	363,526,486	90	388,441,962	90	449,168,796	90	433,769,404	
5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				619,200,000		622,104,455		652,970,939		742,971,902		707,151,153	
Terlaksananya Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	5	619,200,000	5	622,104,455	5	652,970,939	5	742,971,902	5	707,151,153	
5.03.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan				619,200,000		622,104,455		652,970,939		742,971,902		707,151,153	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT  (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT  (02)	BASELINE TAHUN 2024  (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN  (14)
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	5	619,200,000	5	622,104,455	5	652,970,939	5	742,971,902	5	707,151,153	
5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				36,832,000		93,568,557		102,937,120		122,173,912		120,788,095	
Terlaksananya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	36,832,000	12	93,568,557	12	102,937,120	12	122,173,912	12	120,788,095	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
5.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				9,260,000		11,379,960		12,300,662		14,373,401		14,014,088	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	9,260,000	12	11,379,960	12	12,300,662	12	14,373,401	12	14,014,088	
5.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				27,572,000		82,188,597		90,636,458		107,800,511		106,774,007	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT  (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT  (02)	BASELINE TAHUN 2024  (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN  (14)
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	27,572,000	12	82,188,597	12	90,636,458	12	107,800,511	12	106,774,007	
5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				328,368,400		268,693,489		297,805,505		355,741,687		353,688,900	
Terlaksananya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	69	175	328,368,400	80	268,693,489	80	297,805,505	80	355,741,687	80	353,688,900	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	4		12		12		12		12		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	14	14		12		12		12		12		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT  (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT  (02)	BASELINE TAHUN 2024  (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN  (14)
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
5.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				231,790,000		170,699,393		187,746,949		222,787,723		220,221,390	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	14	14	231,790,000	12	170,699,393	12	187,746,949	12	222,787,723	12	220,221,390	
5.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35,986,000		34,772,099		38,844,196		46,713,555		46,713,628	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	4	35,986,000	12	34,772,099	12	38,844,196	12	46,713,555	12	46,713,628	
5.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60,592,400		63,221,997		71,214,360		86,240,409		86,753,882	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT  (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT  (02)	BASELINE TAHUN 2024  (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN  (14)
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	69	175	60,592,400	80	63,221,997	80	71,214,360	80	86,240,409	80	86,753,882	
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				5,843,350,302		9,024,718,559		9,177,128,797		7,106,735,939		8,334,249,354	
Meningkatnya kesesuaian penempatan ASN berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan kinerja	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja (%)	90,59	91,47	486,191,626	92,36	588,596,797	93,25	649,086,519	94,14	772,469,715	95,2	766,000,732	
5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN				486,191,626		588,596,797		649,086,519		772,469,715		766,000,732	
Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen )	2	1	486,191,626	1	588,596,797	1	649,086,519	1	772,469,715	1	766,000,732	
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen )	6	1		1		1		1		1		
	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen )	708	800		800		800		800		800		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT (02)	BASELINE TAHUN 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN (14)
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN				62,184,640		72,705,297		84,162,425		104,207,161		106,774,007	
Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen )	6	1	62,184,640	1	72,705,297	1	84,162,425	1	104,207,161	1	106,774,007	
5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				62,062,165		41,726,518		47,001,477		57,392,992		58,622,934	
Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen )	708	800	62,062,165	800	41,726,518	800	47,001,477	800	57,392,992	800	58,622,934	
5.03.02.2.02.0003 - Pengelolaan Promosi ASN				361,944,821		474,164,982		517,922,617		610,869,562		600,603,791	
Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen )	2	1	361,944,821	1	474,164,982	1	517,922,617	1	610,869,562	1	600,603,791	
Meningkatnya kualifikasi ASN	Nilai Dimensi Kualifikasi ASN (Poin)	21,17	21,3	2,142,105,241	21,4	5,351,204,394	21,6	4,445,112,625	21,8	2,044,739,261	22	2,660,800,362	
5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN				2,142,105,241		5,351,204,394		4,445,112,625		2,044,739,261		2,660,800,362	
Nilai Dimensi Kualifikasi ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan	12	11	2,142,105,241	34	5,351,204,394	34	4,445,112,625	34	2,044,739,261	13	2,660,800,362	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT (02)	BASELINE TAHUN 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN (14)
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	Pendidikan Lanjutan (Orang)												
	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina (Orang)	57	80		50		55		60		70		
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen )	6	5		6		5		5		6		
5.03.02.2.03.0002 - Pengelolaan Assessment Center				643,947,160		4,014,596,841		3,067,396,697		504,362,657		1,696,358,693	
Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen )	6	5	643,947,160	6	4,014,596,841	5	3,067,396,697	5	504,362,657	6	1,696,358,693	
5.03.02.2.03.0004 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				1,343,174,871		1,248,634,144		1,278,621,146		1,419,373,046		840,844,983	
Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	12	11	1,343,174,871	34	1,248,634,144	34	1,278,621,146	34	1,419,373,046	13	840,844,983	
5.03.02.2.03.0013 - Pembinaan Jabatan Fungsional ASN				154,983,210		87,973,409		99,094,782		121,003,558		123,596,686	
Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina (Orang)	57	80	154,983,210	50	87,973,409	55	99,094,782	60	121,003,558	70	123,596,686	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	41,94	58,06	2,550,629,275	70,97	2,712,855,913	83,87	3,669,659,775	96,77	3,793,870,994	100	4,391,827,570	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT  (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT  (02)	BASELINE TAHUN 2024  (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN  (14)
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	yang berbasis Digital (%)												
5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				2,550,629,275		2,712,855,913		3,669,659,775		3,793,870,994		4,391,827,570	
Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang berbasis digital	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen )	1	1	2,550,629,275	1	2,712,855,913	1	3,669,659,775	1	3,793,870,994	1	4,391,827,570	
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Laporan)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen )	1	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen )	2	2		2		2		2		2		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT (02)	BASELINE TAHUN 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN (14)
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen )	1	1		1		1		1		1		
5.03.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				382,965,803		428,961,253		505,152,587		644,874,335		688,634,729	
Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen )	1	2	382,965,803	2	428,961,253	2	505,152,587	2	644,874,335	2	688,634,729	
5.03.02.2.01.0003 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				522,586,062		581,642,377		684,952,661		874,405,878		933,742,030	
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi	1	1	522,586,062	1	581,642,377	1	684,952,661	1	874,405,878	1	933,742,030	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT (02)	BASELINE TAHUN 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN (14)
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen )												
5.03.02.2.01.0006 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi				32,660,000		44,255,398		48,555,245		57,493,606		56,723,691	
Pemberhentian													
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen )	1	1	32,660,000	1	44,255,398	1	48,555,245	1	57,493,606	1	56,723,691	
5.03.02.2.01.0008 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				1,118,400,000		1,137,995,956		1,812,729,158		1,437,340,146		1,868,545,126	
Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1	1	1,118,400,000	1	1,137,995,956	1	1,812,729,158	1	1,437,340,146	1	1,868,545,126	
5.03.02.2.01.0010 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				247,816,195		265,532,389		317,227,603		395,268,540		433,769,404	
Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen )	2	2	247,816,195	2	265,532,389	2	317,227,603	2	395,268,540	2	433,769,404	
5.03.02.2.01.0012 - Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				246,201,215		254,468,540		301,042,521		384,488,489		410,412,590	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT  (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT  (02)	BASELINE TAHUN 2024  (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN  (14)
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Laporan)	2	2	246,201,215	2	254,468,540	2	301,042,521	2	384,488,489	2	410,412,590	
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase ASN dengan Kriteria Kinerja Baik (%)	88	85	664,424,160	85,19	372,061,455	86,64	413,269,878	87,28	495,655,969	88,99	515,620,690	
5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				664,424,160		372,061,455		413,269,878		495,655,969		515,620,690	
Persentase ASN dengan Kriteria Kinerja Baik	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	13	13	664,424,160	13	372,061,455	15	413,269,878	15	495,655,969	18	515,620,690	
	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	0	5		5		5		5		5		
	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)	546	500		350		370		370		390		
	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	0	80		80		80		80		80		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen )	1	13		13		13		13		13		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT (02)	BASELINE TAHUN 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN (14)
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)	11	1		1		1		1		1		
5.03.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				260,202,220		50,577,598		55,029,278		64,680,307		63,397,067	
Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen )	1	13	260,202,220	13	50,577,598	13	55,029,278	13	64,680,307	13	63,397,067	
5.03.02.2.04.0004 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai				131,211,220		52,158,148		58,751,847		71,741,240		73,278,667	
Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	0	5	131,211,220	5	52,158,148	5	58,751,847	5	71,741,240	5	73,278,667	
5.03.02.2.04.0005 - Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai				77,050,720		41,726,518		47,001,477		57,392,992		58,622,934	
Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)	546	500	77,050,720	350	41,726,518	370	47,001,477	370	57,392,992	390	58,622,934	
5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN				65,320,000		75,866,397		84,162,425		100,613,810		106,774,007	
Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan	0	80	65,320,000	80	75,866,397	80	84,162,425	80	100,613,810	80	106,774,007	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT  (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT  (02)	BASELINE TAHUN 2024  (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN  (14)
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	Kedisiplinan (Orang)												
5.03.02.2.04.0008 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				65,320,000		75,866,397		84,162,425		100,613,810		106,774,007	
Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	13	13	65,320,000	13	75,866,397	15	84,162,425	15	100,613,810	18	106,774,007	
5.03.02.2.04.0009 - Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai				65,320,000		75,866,397		84,162,426		100,613,810		106,774,008	
Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)	11	1	65,320,000	1	75,866,397	1	84,162,426	1	100,613,810	1	106,774,008	
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				2,193,389,475		3,883,755,001		4,353,815,857		5,359,291,320		5,469,368,909	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				2,193,389,475		3,883,755,001		4,353,815,857		5,359,291,320		5,469,368,909	
Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	22,13	34,7	2,193,389,475	45,19	3,883,755,001	60,28	4,353,815,857	77,77	5,359,291,320	100	5,469,368,909	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT  (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT  (02)	BASELINE TAHUN 2024  (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN  (14)
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
5.04.02.2.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis				1,193,389,475		2,476,881,704		2,607,580,466		3,052,941,373		3,001,712,973	
Terlaksananya pengembangan kompetensi teknis ASN sesuai rencana pengembangan kompetensi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	416	700	1,193,389,475	900	2,476,881,704	1.300	2,607,580,466	1.500	3,052,941,373	2.000	3,001,712,973	
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT (02)	BASELINE TAHUN 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN (14)
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
5.04.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				1,148,003,475		2,461,076,331		2,591,395,514		3,034,974,765		2,985,029,668	
Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	416	700	1,148,003,475	900	2,461,076,331	1.300	2,591,395,514	1.500	3,034,974,765	2.000	2,985,029,668	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT  (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT  (02)	BASELINE TAHUN 2024  (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN  (14)
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
5.04.02.2.01.0004 - Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				45,386,000		15,805,373		16,184,952		17,966,608		16,683,305	
Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan	2	2	45,386,000	2	15,805,373	2	16,184,952	2	17,966,608	2	16,683,305	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT (02)	BASELINE TAHUN 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN (14)
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Pemerintahan Umum	Urusan Pemerintahan Umum (Dokumen)												
5.04.02.2.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				1,000,000,000		1,406,873,297		1,746,235,391		2,306,349,947		2,467,655,936	
Terlaksana pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan dasar ASN sesuai rencana pengembangan kompetensi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	11	7	1,000,000,000	3	1,406,873,297	3	1,746,235,391	3	2,306,349,947	3	2,467,655,936	
5.04.02.2.02.0007 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,				1,000,000,000		1,406,873,297		1,746,235,391		2,306,349,947		2,467,655,936	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT  (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT  (02)	BASELINE TAHUN 2024  (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN   (14)
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Kepemimpinan, dan Prajabatan													
Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	11	7	1,000,000,000	3	1,406,873,297	3	1,746,235,391	3	2,306,349,947	3	2,467,655,936	

Pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM didukung oleh program prioritas yaitu Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Keberhasilan program prioritas BKPSDM 2025- 2029 didukung oleh sub kegiatan sebagaimana terlampir.

Tabel 18. Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
			5.03.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	
			5.03.02.2.01.0003 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
			5.03.02.2.01.0006 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi	
			Pemberhentian	
			5.03.02.2.01.0008 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	
			5.03.02.2.01.0010 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
			5.03.02.2.01.0012 - Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	
		Meningkatnya kesesuaian penempatan ASN berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan kinerja	5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN	
			5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN	
			5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
			5.03.02.2.02.0003 - Pengelolaan Promosi ASN	
		Meningkatnya kualifikasi ASN	5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN	
			5.03.02.2.03.0002 - Pengelolaan Assessment Center	
			5.03.02.2.03.0004 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			5.03.02.2.03.0013 - Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	
		Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
			5.03.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
			5.03.02.2.04.0004 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	
			5.03.02.2.04.0005 - Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	
			5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN	
			5.03.02.2.04.0008 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	
			5.03.02.2.04.0009 - Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	
2.	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya Kompetensi ASN	5.04.02.2.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	
			5.04.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
			5.04.02.2.01.0004 - Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
			5.04.02.2.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			5.04.02.2.02.0007 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	

Pengukuran tingkat keberhasilan dari tugas-tugas BKPSDM Kota Balikpapan ditetapkan berdasarkan indikator kinerja Perangkat Daerah. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BKPSDM Kota Balikpapan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Pencapaian Target keberhasilan tujuan dan sasaran Renstra BKPSDM ditentukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain IKU, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan urusan yang turut mengungkit keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM 2025 -2029. IKU dan IKK yang disajikan pada tabel berikut merupakan indikator yang telah terseleksi dan sesuai dengan urusan tugas dan fungsi BKPSDM Kota Balikpapan.

Tabel 19. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Indeks Sistem Merit	poin	0,68	0,69	0,7	0,71	0,72	0,73	0,74	
2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	87,69	88,02	88,5	88,75	89	89,05	89,25	
3.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	78,59	79	79,5	79,8	80	80,2	80,5	

Tabel 20. Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01 )	(02)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	23,1	15,35	16,21	16,97	18,03	28,59	40,34	
2	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	57,4	39,96	49,34	59,52	70,4	82,1	94,46	
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	36,6	35,3	38,28	41,3	43,59	30,68	23,92	

## BAB V PENUTUP

Rankhir Renstra BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun, yang disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis akan digunakan sebagai acuan di dalam perencanaan tahunan melalui penyusunan Rencana Kerja yang selanjutnya setelah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi Renja untuk kemudian digunakan sebagai pedoman di dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran BKPSDM Kota Balikpapan. Rencana Strategis juga akan dijadikan sebagai acuan di dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagai penilaian terhadap upaya-upaya yang dilakukan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Diperlukan komitmen seluruh jajaran BKPSDM Kota Balikpapan dalam rangka melaksanakan seluruh amanah dalam dokumen Renstra ini, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan ASN unggul menuju Balikpapan sebagai kota Global yang nyaman untuk semua.

## AA. INSPEKTORAT

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Inspektorat merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki peran strategis dalam menjamin terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat dituntut untuk mampu melaksanakan fungsi pengawasan yang tidak hanya bersifat detektif dan represif, tetapi juga preventif dan konsultatif.

Kondisi tata kelola pemerintahan daerah saat ini menunjukkan adanya perbaikan dari waktu ke waktu, namun masih menghadapi berbagai tantangan. Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta hasil pemeriksaan BPK dan aparat pengawas eksternal lainnya masih menampilkan sejumlah kelemahan yang perlu segera diperbaiki. Di sisi lain, tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi semakin tinggi, sehingga keberadaan Inspektorat menjadi semakin vital sebagai *guardian of integrity* dalam birokrasi daerah.

Dalam konteks pembangunan nasional dan daerah periode 2025–2029, pemerintah pusat telah menetapkan arah kebijakan yang menekankan pentingnya transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital, penguatan integritas, serta penerapan pengawasan berbasis risiko. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 secara tegas mengamanatkan bahwa penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, termasuk Renstra Inspektorat, harus mengedepankan pendekatan berbasis data, berorientasi hasil (*result-based management*), serta selaras dengan target pembangunan jangka menengah daerah dan nasional.

Bagi Inspektorat, hal ini bermakna bahwa strategi pengawasan harus diarahkan untuk:

1. Meningkatkan maturitas SPIP dari kondisi *baseline* saat ini (Nilai 3,292 pada tahun 2024) menuju nilai 3,442 pada tahun 2030, sehingga seluruh



perangkat daerah memiliki sistem pengendalian intern yang lebih andal dan berkesinambungan.

2. Meningkatkan kapabilitas APIP dari nilai 3,000 pada tahun 2024 menuju nilai 3,150 pada tahun 2030, agar Inspektorat mampu memberikan jaminan kualitas (*assurance*), layanan konsultasi, sekaligus menjadi *early warning system* bagi pemerintah daerah.
3. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang tercermin dalam kenaikan nilai SAKIP dari 80,82 pada tahun 2024 menjadi 82,17 pada tahun 2030.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan baik dari BPK maupun APIP, sehingga rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara optimal.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung efektivitas pengawasan, termasuk melalui Rumah Integritas (Ruang Urai Masalah Akuntabilitas, Kompetensi dan Attitude Dengan Tuntas), e-audit, e-SPIP, dan integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI).

Selain itu, penyusunan Renstra Inspektorat 2025–2029 juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperkuat peran pengawasan dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Inspektorat tidak hanya berfungsi sebagai pengendali internal, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi seluruh perangkat daerah untuk mendorong terciptanya birokrasi yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis, termasuk era digitalisasi pemerintahan dan tuntutan transparansi publik.

Dengan demikian, Renstra Inspektorat Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis pelaksanaan tugas pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen manajemen perubahan untuk memastikan terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan berdaya saing.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 54);
21. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043;
22. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Inspektorat dalam melaksanakan tugas, fungsi, serta perannya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Renstra ini disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengawasan intern berjalan terarah, terukur, terintegrasi dengan RPJMD, serta mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, Renstra ini berfungsi sebagai:

1. Instrumen perencanaan strategis yang memandu arah pembangunan bidang pengawasan daerah dalam kurun waktu lima tahun.

2. Alat koordinasi dan sinkronisasi antara Inspektorat dengan perangkat daerah lainnya, agar pelaksanaan pengawasan sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional.
3. Dasar bagi pengendalian dan evaluasi kinerja Inspektorat, sehingga capaian kinerja dapat diukur secara jelas melalui indikator yang ditetapkan.

b. Tujuan

Renstra Inspektorat 2025–2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menetapkan arah kebijakan pengawasan intern yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah serta tujuan pembangunan jangka menengah daerah.
2. Meningkatkan efektivitas pengendalian intern melalui penguatan implementasi SPIP di seluruh perangkat daerah, sehingga target Maturitas SPIP Level 3 dengan nilai 3,442 dapat tercapai pada tahun 2030.
3. Meningkatkan kapabilitas APIP menuju Level 3 dengan nilai 3,150 pada tahun 2030, agar Inspektorat mampu memberikan layanan assurance, konsultasi, serta fungsi peringatan dini yang lebih komprehensif.
4. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah, melalui pendampingan, asistensi, dan reviu dokumen perencanaan serta pelaporan kinerja, sehingga nilai SAKIP dapat meningkat signifikan.
5. Mendorong kepatuhan tindak lanjut hasil pengawasan baik dari BPK maupun APIP, sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas keuangan daerah.
6. Mengembangkan inovasi dan digitalisasi pengawasan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi proses pengawasan.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

1. Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun

2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

2. Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.
3. Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.
4. Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan Informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik.
2. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan indikator kinerja kunci (IKK).
3. Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (bukan menarasikan data).
4. Penyajian pada bab ini memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tugas, fungsi, dan struktur PD;
  - b. Sumber daya PD;
  - c. Kinerja penyelenggaraan pelayanan PD;
  - d. Kelompok sasaran pelayanan PD;
  - e. Mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada);
  - f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (jikalau ada); dan
  - g. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (jikalau ada).
5. Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan

permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan.

6. Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.
7. Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD.
8. Merumuskan isu strategis daerah (dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari:
  - a. permasalahan;
  - b. isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan
  - c. potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

### BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada:
  - a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
  - b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
2. Mempertimbangkan kondisi PD yang ada saat ini, direkomendasikan agar Renstra PD cukup memiliki 1 (satu) tujuan.
3. Jika PD mampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra PD direkomendasikan tetap 1 (satu) dengan menggabungkan kedua urusan dimaksud. Namun untuk sasarannya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu.

4. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan:
  - a. kalimat kondisi;
  - b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; dan
  - d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan *intermediate outcome*.
5. Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
6. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.
7. Penyajian lokus Renstra PD untuk provinsi dapat disajikan berdasarkan kabupaten/kota dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.
8. Penyajian lokus Renstra PD untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.
9. Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

#### BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.
2. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.
3. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya



menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.

## BAB V PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat**

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota untuk membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

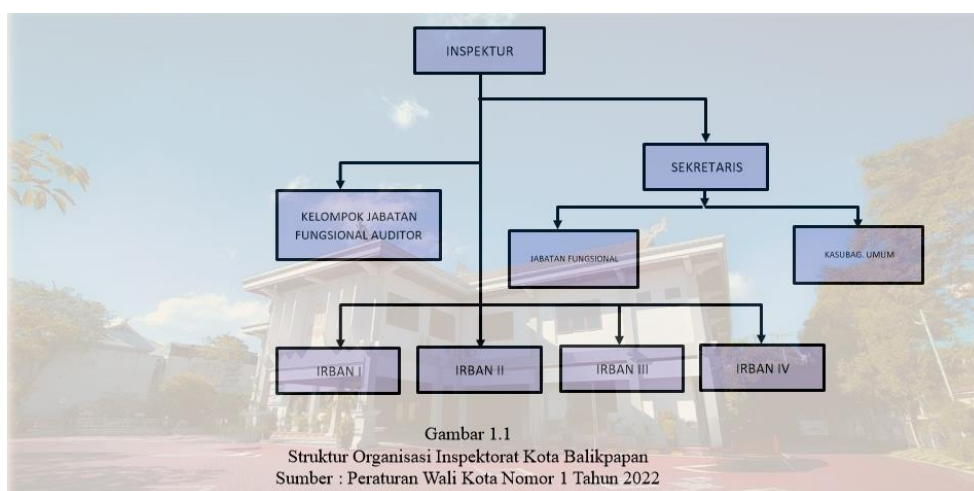
Inspektorat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, yang membawahkan:
  1. Subbagian Umum; dan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;

- f. Inspektur Pembantu IV; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



### 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Demikian pula kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan perhitungan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Inspektorat Kota Balikpapan diketahui bahwa kebutuhan personil ASN berjumlah 110 (Seratus Sepuluh) orang. Namun untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat Kota Balikpapan hanya didukung oleh 57 (lima puluh tujuh) orang ASN dan 1 orang tenaga administrasi.

Jumlah ASN Inspektorat Kota Balikpapan berdasarkan jabatan dan jenis kelamin tergambar secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Jumlah ASN Inspektorat Kota Balikpapan  
menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Inspektur	-	1
2	Sekretaris	1	-
3	Inspektur Pembantu	3	1
4	Auditor Madya	2	2
5	Auditor Muda	1	11
6	Auditor Penyelia	1	1
7	Auditor Pertama	2	4
8	Auditor Mahir	1	2

9	Auditor Terampil	4	3
10	P2UPD Pertama	2	1
11	Perencana Ahli Muda	-	2
12	Kepala Sub Bagian Umum	1	-
13	Penelaah Teknis Kebijakan	1	2
14	Pengadministrasi Perkantoran	4	3
15	Pranata Komputer	-	1
16	Operator Layanan Operasional	1	-
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>34</b>

Sumber : Inspektorat Kota Balikpapan, 2025

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya (2021–2024), Inspektorat Kota Balikpapan telah menunjukkan kemajuan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan intern pemerintah daerah. Berbagai capaian kinerja pelayanan berhasil diraih melalui pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan, asistensi, serta pembinaan perangkat daerah. Capaian tersebut mencerminkan komitmen Inspektorat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Secara umum, kinerja pelayanan Inspektorat Kota Balikpapan dapat dilihat dari beberapa indikator utama, antara lain:

#### 1. Peningkatan Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP telah meningkat dan berhasil mencapai Level 3 (*Integrated*), yang menunjukkan bahwa Inspektorat telah mampu melaksanakan peran assurance dan konsultasi secara sistematis serta terintegrasi dengan proses manajemen di perangkat daerah.

#### 2. Peningkatan Maturitas SPIP

Maturitas SPIP Pemerintah Kota Balikpapan menunjukkan tren positif dengan capaian Level 3,292 pada tahun 2024, yang menandakan bahwa penerapan pengendalian intern telah berjalan konsisten dan mulai berorientasi pada manajemen risiko.

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)  
Nilai SAKIP Pemerintah Kota Balikpapan juga mengalami peningkatan dari 81,92 (kategori A) pada tahun 2025 dengan target menuju 82,17 (kategori A) pada tahun 2030, melalui pendampingan dan reviu berkelanjutan oleh Inspektorat.
4. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan  
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) baik dari BPK maupun APIP menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, mencerminkan efektivitas fungsi pengawasan dan pembinaan Inspektorat terhadap perangkat daerah.
5. Pengembangan Pengawasan Berbasis Digital  
Inspektorat mulai mengimplementasikan sistem pengawasan berbasis elektronik melalui Rumah Integritas, aplikasi SIMHPNas, e-Reviu, dan integrasi data dengan SIPD-RI, sebagai langkah transformasi menuju digitalisasi pengawasan.

Capaian-capaian tersebut menggambarkan bahwa kinerja pelayanan Inspektorat Kota Balikpapan telah berkembang ke arah yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi hasil. Namun demikian, tantangan masih ada, antara lain peningkatan kompetensi SDM pengawas, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta percepatan tindak lanjut hasil pengawasan di seluruh perangkat daerah.

Ke depan, Inspektorat akan terus memperkuat kualitas pelayanan pengawasan melalui peningkatan kapabilitas, kolaborasi lintas perangkat daerah, serta inovasi pengawasan digital yang terintegrasi, sehingga fungsi pengawasan dapat benar-benar menjadi penggerak utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Balikpapan yang bersih dan berintegritas.

#### 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Inspektorat adalah pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menerima manfaat dari pelaksanaan tugas pengawasan intern pemerintah daerah. Sasaran layanan ini mencakup:

1. Kepala Daerah, sebagai penerima utama laporan hasil pengawasan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat, cepat, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).
2. Perangkat Daerah, sebagai objek pemeriksaan sekaligus mitra pengawasan dalam rangka peningkatan tata kelola, akuntabilitas kinerja, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, melalui kegiatan pembinaan, asistensi, dan pendampingan terkait penerapan SPIP, SAKIP, serta pembinaan dan pengawasan lainnya.
4. Masyarakat, secara tidak langsung memperoleh manfaat dari peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diawasi oleh Inspektorat.
5. Aparat Pengawas Eksternal dan Aparat Penegak Hukum (APH), sebagai mitra koordinasi dalam rangka sinergi pengawasan dan penegakan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian, layanan Inspektorat tidak hanya ditujukan kepada pimpinan daerah sebagai penerima utama hasil pengawasan, tetapi juga berimplikasi pada seluruh perangkat daerah dan masyarakat luas melalui terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

#### 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern, Inspektorat tidak dapat bekerja sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dengan berbagai perangkat daerah. Mitra perangkat daerah tersebut berperan penting dalam menyediakan data, informasi, maupun tindak lanjut atas hasil pengawasan. Adapun mitra perangkat daerah Inspektorat antara lain:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang), sebagai mitra dalam integrasi hasil pengawasan dengan perencanaan pembangunan daerah, serta dalam penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan.

2. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dalam rangka pengawasan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengendalian internal atas pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban daerah.
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), terkait pembinaan disiplin aparatur, manajemen kinerja serta pengembangan kapasitas ASN.
4. Sekretariat Daerah, dalam hal koordinasi kebijakan dan penyusunan regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan pengawasan.
5. Seluruh Perangkat Daerah teknis, sebagai objek pembinaan dan pengawasan serta penerima layanan pendampingan asistensi SPIP, SAKIP, serta tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.
6. Bagian Hukum atau Biro Hukum, dalam mendukung penyempurnaan regulasi daerah dan penanganan tindak lanjut hasil pengawasan yang membutuhkan aspek legal.

Melalui kemitraan dengan perangkat daerah tersebut, Inspektorat dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsi assurance dan consulting, sekaligus memastikan bahwa hasil pengawasan berkontribusi nyata terhadap peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### 2.1.6 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab OPD

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan intern, Inspektorat menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat internal pemerintah daerah maupun dengan instansi eksternal. Kerja sama ini bersifat strategis karena bertujuan memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan kualitas tata kelola, serta mendorong akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun bentuk kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Inspektorat meliputi:

1. Kerja Sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  - a. Sinergi dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPIP.

- b. Peningkatan kapabilitas APIP melalui asistensi dan pendampingan.
  - c. Penguatan pengawasan berbasis risiko serta penyelesaian tindak lanjut hasil audit.
2. Kerja Sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- a. Koordinasi pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah.
  - b. Penyediaan data dan informasi yang diperlukan dalam mendukung proses audit.
3. Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH)
- a. Kejaksaan dan Kepolisian dalam penanganan kasus yang berindikasi kerugian negara/daerah.
  - b. Koordinasi dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat**

### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Inspektorat**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern, Inspektorat masih menghadapi berbagai kendala yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada perangkat daerah maupun pemangku kepentingan lainnya. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya manusia auditor dan PPUPD  
Jumlah serta kompetensi auditor yang tersedia belum sebanding dengan luasnya lingkup dan jumlah objek pembinaan dan pengawasan, sehingga cakupan pengawasan belum optimal dan berdampak pada kualitas layanan pengawasan.
2. Implementasi SPIP belum merata  
Meskipun terdapat peningkatan maturitas SPIP, sebagian besar perangkat daerah masih berada pada level dasar sehingga memerlukan pendampingan intensif dari Lini 1 dan Lini 2 serta APIP sebagai Lini 3 dalam pengelolaan SPIP.
3. Kapabilitas APIP yang masih terbatas  
Inspektorat Kota Balikpapan berada pada Level 3, sehingga kemampuan memberikan layanan konsultasi, assurance, serta



peringatan dini (*early warning system*) masih perlu diperkuat untuk menjawab tantangan tata kelola pemerintahan modern.

4. Tindak lanjut hasil pengawasan belum optimal

Beberapa perangkat daerah belum konsisten dan tepat waktu dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan, sehingga mengurangi efektivitas perbaikan tata kelola.

5. Pemanfaatan teknologi informasi masih terbatas

Sistem informasi pengawasan, termasuk Rumah Integritas, e-audit, e-SPIP, dan integrasi dengan SIPD-RI, belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal, sehingga sebagian proses pengawasan masih dilakukan secara manual dan kurang efisien.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar dalam perumusan isu strategis, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan Inspektorat dalam periode Renstra 2025–2029, sehingga ke depan kualitas pelayanan pengawasan dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan.

## 2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi potensi daerah yang menjadi kewenangan Inspektorat, permasalahan, isu KLHS yang relevan dengan kewenangan Inspektorat, isu lingkungan dinamis yang relevan serta tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel, terdapat sejumlah isu strategis yang harus menjadi fokus Inspektorat dalam periode Renstra 2025–2029 yang tergambar melalui table berikut:

Tabel 2.2  
Isu Strategis Inspektorat Kota Balikpapan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.Akuntabilitas dan efektifitas pemerintahan	Belum optimalnya akuntabilitas tata kelola Perangkat	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel	Transformasi Pengawasan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan	Belum optimalnya pengawasan	Penguatan fungsi pembinaan

2. Good Governance	Daerah karena kurangnya pengendalian intern perangkat daerah	dan transparan di semua tingkat		birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	internal pemerintah daerah	dan pengawasan
	Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan					
	Perlunya Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah					
	Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan masih terbatas					

Dengan memperhatikan isu-isu strategis tersebut, Inspektorat diharapkan mampu bertransformasi menjadi lembaga pengawasan yang profesional, modern, dan berdaya saing, sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, serta berorientasi pada hasil.

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

Dalam rangka mendukung tercapainya visi Wali Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yaitu **"Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman"** yang mencerminkan Kota Balikpapan sebagai kota maju berperadapan tinggi yang nyaman dihuni dengan spriritualitas yang mewarnai seluruh aktifitas penduduk kota, Inspektorat berperan melalui misi ke 1 yaitu **Membangun dan Mengembangkan Pemerintah yang Bersih dan Profesional Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat.**

Misi ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pemerintahan yang bersih menjadi landasan utama untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Kota Balikpapan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik, setiap kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat.

Selain itu, profesionalitas ASN menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi ASN, pemanfaatan TIK, dan peningkatan penerapan standar pelayanan pemerintah daerah sehingga dapat memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, efektif, dan efisien. Dari hal tersebut masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah yang benar-benar berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat maupun kemajuan daerah.

Berangkat dari hal tersebut, pemerintahan yang bersih dan profesionalitas tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kinerja birokrasi semata, melainkan juga untuk memperkuat demokrasi lokal dan keadilan sosial. Pemerintah dituntut lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga akan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perekonomian daerah, stabilitas daerah, dan kesejahteraan masyarakat serta mampu menciptakan Kota Balikpapan yang nyaman untuk semua. Prasyarat

yang dibutuhkan untuk mendorong misi ini adalah komitmen yang kuat dan kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat yang semakin meningkat.

Guna mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Balikpapan tahun 2025-2029, Inspektorat memiliki tujuan dan sasaran dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kota Balikpapan untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas pengawasan intern, sehingga peran Inspektorat semakin strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Secara lebih rinci, tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat adalah:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Terwujudnya fungsi pembinaan dan pengawasan intern untuk penguatan akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3,317	3,342	3,367	3,392	3,417	3,442	
		Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,025	3,050	3,075	3,100	3,125	3,150	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilit	Nilai AKIP Inspektorat	81,92	81,97	82,02	82,07	82,12	82,17	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		as Kinerja Instansi Pemerintah								

### 3.2 Strategi Inspektorat Kota Balikpapan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025–2029, diperlukan strategi yang komprehensif, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Strategi tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi eksisting, isu strategis, serta target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun strategi yang akan ditempuh melalui penahapan selama 5 (lima) tahun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Penahapan Renstra Inspektorat

TAHAP I (2026)	TAHAP I (2027)	TAHAP (2028)	TAHAP (2029)	TAHAP (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan pemanfaatan digitalisasi pengawasan	Peningkatan pemanfaatan digitalisasi pengawasan	Peningkatan pemanfaatan digitalisasi pengawasan	Peningkatan pemanfaatan digitalisasi pengawasan	Peningkatan pemanfaatan digitalisasi pengawasan
Peningkatan kapabilitas APIP melalui pengembangan kompetensi dan tata kelola dokumen pengawasan	Peningkatan kapabilitas APIP melalui pengembangan kompetensi dan tata kelola dokumen pengawasan	Peningkatan kapabilitas APIP melalui pengembangan kompetensi dan tata kelola dokumen pengawasan	Peningkatan kapabilitas APIP melalui pengembangan kompetensi dan tata kelola dokumen pengawasan	Peningkatan kapabilitas APIP melalui pengembangan kompetensi dan tata kelola dokumen pengawasan
Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada seluruh Perangkat Daerah	Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada seluruh Perangkat Daerah	Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada seluruh Perangkat Daerah	Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada seluruh Perangkat Daerah	Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada seluruh Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP I (2027)	TAHAP (2028)	TAHAP (2029)	TAHAP (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Efektifitas Pengendalian Korupsi	Peningkatan Efektifitas Pengendalian Korupsi	Peningkatan Efektifitas Pengendalian Korupsi	Peningkatan Efektifitas Pengendalian Korupsi	Peningkatan Efektifitas Pengendalian Korupsi

### 3.3 Arah Kebijakan Inspektorat Kota Balikpapan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Inspektorat Kota Balikpapan dirumuskan untuk memperjelas langkah operasional dari strategi yang ditetapkan, sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pengawasan selama periode 2025–2029. Arah kebijakan tersebut meliputi:

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Renstra Inspektorat

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembinaan dan Pengawasan	Perbaikan tata kelola kelembagaan dan birokrasi	Peningkatan Kapabilitas APIP	Peraturan Kepala BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
2			Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	
3		Menguatkan aksi pencegahan korupsi	Optimalisasi peran Unit Pengendali Risiko Perangkat Daerah	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
4			Penguatan implementasi Zona Integritas pada	

			Perangkat Daerah	
5			Peningkatan kualitas pengawasan internal	
6			Pengawasan Berbasis Risiko	

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat melalui beberapa arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapabilitas APIP

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Melalui peningkatan kapabilitas APIP, Inspektorat diharapkan mampu memberikan layanan *assurance* yang berkualitas, konsultasi yang konstruktif, serta berfungsi sebagai *early warning system*. Upaya ini dilakukan dengan pengembangan SDM APIP, penerapan audit berbasis risiko, serta pemenuhan standar kapabilitas APIP menuju Level 4 pada tahun 2029.

2. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan seluruh perangkat daerah mampu mengimplementasikan SPIP secara efektif dan berkesinambungan. Fokusnya adalah meningkatkan maturitas SPIP dari level dasar menuju Level 3, dengan mendorong perangkat daerah mengintegrasikan manajemen risiko, pengendalian kegiatan, dan monitoring ke dalam proses manajemen pemerintahan.

3. Optimalisasi Peran Unit Pengendali Risiko Perangkat Daerah

Arah kebijakan ini menekankan pentingnya peran Unit Pengendali Risiko (UPR) di setiap perangkat daerah sebagai ujung tombak penerapan manajemen risiko. Inspektorat berperan dalam pembinaan, pendampingan, serta penguatan kapasitas UPR agar mampu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko penyelenggaraan pemerintahan. Dengan optimalisasi peran UPR,

diharapkan pengelolaan risiko di perangkat daerah lebih terstruktur dan berorientasi pada pencegahan.

4. Penguatan Implementasi Zona Integritas pada Perangkat Daerah  
Arah kebijakan ini ditujukan untuk mendukung pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di perangkat daerah. Inspektorat berperan sebagai pengawas sekaligus pendamping dalam pelaksanaan ZI agar benar-benar berdampak pada perbaikan integritas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
5. Peningkatan Kualitas Pengawasan Internal  
Kebijakan ini menekankan pada perbaikan metodologi, standar, dan prosedur pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat. Fokusnya adalah menghasilkan laporan pengawasan yang lebih akurat, komprehensif, dan aplikatif, sehingga mampu mendorong perangkat daerah melakukan perbaikan tata kelola. Kualitas pengawasan internal ditingkatkan melalui digitalisasi, pemanfaatan *data analytics*, serta penguatan peran konsultatif Inspektorat.
6. Pengawasan Berbasis Risiko  
Arah kebijakan ini mengutamakan pendekatan pengawasan yang berfokus pada area-area berisiko tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan menerapkan *risk based audit* dan *risk based monitoring*, Inspektorat dapat mengalokasikan sumber daya pengawasan secara lebih efektif, mencegah potensi penyimpangan sejak dini, serta memberikan rekomendasi yang lebih relevan dan berdampak bagi peningkatan tata kelola pemerintahan daerah.



**BAB IV**  
**PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN**  
**BIDANG URUSAN**

**4.1 Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025–2029, pelaksanaan pengawasan intern pemerintah daerah dituangkan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun secara terarah, terukur, serta sesuai dengan kerangka kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan Inspektorat Kota Balikpapan dirancang tidak hanya untuk memenuhi kewajiban administratif dalam dokumen perencanaan daerah menjadi instrumen strategis untuk memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kapabilitas pengawasan, serta mendorong budaya birokrasi yang bersih dan berintegritas.

Program Inspektorat pada dasarnya mencerminkan *outcome* yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, yaitu peningkatan kualitas pengawasan intern pemerintah daerah. Untuk mencapai *outcome* tersebut, program dijabarkan ke dalam kegiatan yang lebih spesifik, antara lain kegiatan perencanaan program pengawasan, pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, monitoring tindak lanjut hasil pengawasan, serta pengembangan kapasitas SDM pengawas. Selanjutnya, setiap kegiatan diturunkan lagi menjadi sub kegiatan yang lebih operasional, sehingga dapat dilaksanakan oleh unit-unit kerja di lingkungan Inspektorat dengan indikator dan target kinerja yang jelas.

Dengan penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan secara berjenjang ini, diharapkan Inspektorat Kota Balikpapan dapat memastikan keterpaduan antara arah kebijakan, strategi, hingga implementasi teknis di lapangan. Setiap sub kegiatan yang dilaksanakan memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam hal peningkatan maturitas SPIP, peningkatan kapabilitas APIP, penguatan akuntabilitas kinerja (SAKIP), serta optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan.

Dengan demikian, struktur program, kegiatan, dan sub kegiatan Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 tidak hanya bersifat

administratif, melainkan berfungsi sebagai instrumen manajemen yang menghubungkan visi, tujuan, dan strategi dengan implementasi nyata di lapangan. Penyusunan yang sistematis ini sekaligus menjamin bahwa setiap langkah pengawasan intern mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya sebagai berikut:

Tabel 4.1

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Inspektorat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KE T.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Terwujudnya fungsi pembinaan dan pengawasan intern untuk penguatan akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah				Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		
		Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan			Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
				Terlaksananya pengawasan internal sesuai PKPT Berbasis Risiko Inspektorat Kota Balikpapan		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KE T.
					Pemerintah Daerah		
					Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
					Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
			Meningkatnya kualitas konsultasi dan pencegahan korupsi		Indeks Persepsi Anti Korupsi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
					Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan		
				Tersedianya dokumen kebijakan		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
					Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Sub Kegiatan perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pengawasan	
				Terlaksananya pendampingan dan asistensi terkait SPIP, pencegahan korupsi dan peningkatan integritas		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KE T.
					pemerintahan daerah		
					Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
					Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan verifikasi Penegakan Integritas	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Nilai AKIP Inspektorat		
			Meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya indikator kinerja yang relevan, terukur dan selaras dari tingkat individu hingga organisasi		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terwujudnya profesionalisme aparatur		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KE T.
				perangkat daerah			
					Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah orang berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	
					Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terwujudnya layanan umum perkantoran perangkat daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jenis paket bahan logistik kantor yang disediakan	Penyediaan bahan Logistik Kantor	
					Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	
					Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dukumen Dukungan	Dukungan Pelaksanaan Sistem	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KE T.
					Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terwujudnya operasional umum perangkat daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KE T.
					dan listrik yang disediakan		
					Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar berfungsi optimal		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

#### 4.2 Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, diperlukan penjabaran program dan kegiatan ke dalam sub kegiatan yang lebih operasional. Sub kegiatan ini merupakan bentuk konkrit dari pelaksanaan pengawasan intern oleh Inspektorat, sehingga dapat langsung diukur capaian kinerjanya melalui indikator yang relevan, target tahunan yang terukur, serta dukungan pagu indikatif yang disediakan dalam rencana keuangan daerah.

Penyusunan sub kegiatan dimaksudkan agar setiap aktivitas pengawasan memiliki keterkaitan yang jelas dengan indikator kinerja perangkat daerah, serta dapat dipantau progres dan hasilnya secara sistematis melalui SIPD-RI. Dengan demikian, setiap rupiah anggaran yang

dialokasikan pada sub kegiatan Inspektorat dapat dipertanggungjawabkan dan memberi kontribusi nyata terhadap peningkatan maturitas SPIP, kapabilitas APIP, akuntabilitas kinerja perangkat daerah (SAKIP), serta optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan.

Guna peningkatan kinerja pengawasan di internal Perangkat Daerah dan untuk memberikan motivasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengawasan, Inspektorat juga menyusun perencanaan kegiatan dan pendanaan untuk kegiatan Wali Kota *Awards* Bidang Pengawasan.

Adapun rincian sub kegiatan beserta indikator, target dan pagu indikatif dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.2

## Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	91,9	92,8	1.521.682.155	93,1	2.495.000.000	93,4	2.885.000.000	93,7	3.190.000.000	94	3.195.000.000	
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal				1.044.082.155		1.820.000.000		2.100.000.000		2.300.000.000		2.300.000.000	
Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	53	55	750.582.155	55	1.020.000.000	55	1.200.000.000	55	1.300.000.000	55	1.300.000.000	
Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	4	4	293.500.000	4	800.000.000	4	900.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				477.600.000		675.000.000		785.000.000		890.000.000		895.000.000	
Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	3	4	26.100.000	4	75.000.000	4	85.000.000	4	90.000.000	4	95.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	13	15	451.500.000	15	600.000.000	15	700.000.000	15	800.000.000	15	800.000.000	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,7	3,73	2.083.105.000	3,75	2.600.000.000	3,77	2.870.000.000	3,8	3.140.000.000	3,82	3.160.000.000	
	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	3,67	3,69		3,72		3,74		3,77		3,79		
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				228.800.000		300.000.000		320.000.000		340.000.000		360.000.000	
Sub Kegiatan perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	2	2	228.800.000	2	300.000.000	2	320.000.000	2	340.000.000	2	360.000.000	
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi				1.854.225.000		2.300.000.000		2.550.000.000		2.800.000.000		2.800.000.000	
Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	36	36	672.625.000	36	1.000.000.000	36	1.100.000.000	36	1.200.000.000	36	1.200.000.000	
Sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3	4	819.200.000	4	900.000.000	4	1.000.000.000	4	1.100.000.000	4	1.100.000.000	
Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan	36	36	362.400.000	36	400.000.000	36	450.000.000	36	500.000.000	36	500.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
dan verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	81,44	86,25	22.527.201.845	88,5	26.263.387.000	88,75	27.171.306.000	89	27.254.832.000	89,25	28.237.377.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22.200.000		60.000.000		69.000.000		70.000.000		83.490.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	2	22.200.000	2	60.000.000	2	69.000.000	2	70.000.000	2	83.490.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.969.041.000		17.000.000.000		18.000.000.000		19.000.000.000		20.000.000.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	46	56	15.969.041.000	58	17.000.000.000	60	18.000.000.000	62	19.000.000.000	64	20.000.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.005.034.400		2.736.387.000		3.120.000.000		2.064.832.000		2.014.887.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	40	50	700.000.000	52	1.000.000.000	53	1.200.000.000	54	700.000.000	55	750.000.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah orang berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti bimbingan	41	56	1.144.700.000	58	1.536.387.000	60	1.700.000.000	62	1.124.832.000	64	1.004.887.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	teknis peraturan perundang-undangan												
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	3	2	160.334.400	2	200.000.000	2	220.000.000	2	240.000.000	2	260.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.803.883.520		2.015.000.000		2.089.306.000		2.311.000.000		2.309.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2	2	22.000.000	2	30.000.000	2	33.000.000	2	36.000.000	2	39.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	3	500.284.155	4	525.000.000	4	471.308.000	8	575.000.000	10	600.000.000	
Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jenis paket bahan logistik kantor yang disediakan	7	7	404.998.915	7	450.000.000	7	500.000.000	7	500.000.000	7	550.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	1	136.600.450	1	200.000.000	1	220.000.000	1	240.000.000	1	250.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	11	240	50.000.000	240	60.000.000	240	65.000.000	240	70.000.000	240	70.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	65	60	600.000.000	65	750.000.000	60	800.000.000	60	800.000.000	60	800.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1	90.000.000	0	0	0	0	1	90.000.000	0	90.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				620.698.425		2.100.000.000		1.445.000.000		1.265.000.000		1.285.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	32	16	90.298.425	20	300.000.000	20	350.000.000	20	375.000.000	20	375.000.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	0	2	187.200.000	4	400.000.000	4	425.000.000	4	450.000.000	4	450.000.000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	1	800.000.000	0	0	0	0	0	0	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	1	200.000.000	1	250.000.000	0	0	0	0	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	0	3	343.200.000	3	400.000.000	3	420.000.000	3	440.000.000	3	460.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Dinas Jabatan yang disediakan												
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				956.000.000		1.107.000.000		1.158.000.000		1.209.000.000		1.210.000.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4	4	6.000.000	4	7.000.000	4	8.000.000	4	9.000.000	4	10.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	12	250.000.000	12	300.000.000	12	325.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	12	700.000.000	12	800.000.000	12	825.000.000	12	850.000.000	12	850.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.150.344.500		1.245.000.000		1.290.000.000		1.335.000.000		1.335.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	33	26	750.000.000	26	825.000.000	26	850.000.000	26	875.000.000	26	875.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	40	50	200.000.000	50	220.000.000	50	240.000.000	50	260.000.000	50	260.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1	200.344.500	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	

#### **4.3 Sub Kegiatan Dalam Rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Dalam rangka memastikan keterpaduan antara kebijakan pengawasan dengan arah pembangunan Kota Balikpapan, Inspektorat menurunkan program dan kegiatan pengawasan ke dalam sub kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Sub kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis pelaksanaan pengawasan, tetapi juga sebagai bentuk komitmen Inspektorat untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam pelaksanaan program prioritas daerah.

Melalui sub kegiatan tersebut, Inspektorat berperan aktif dalam memberikan pendampingan, reuiu, evaluasi, serta pengawasan berbasis risiko terhadap pelaksanaan program prioritas daerah, sehingga setiap tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dengan demikian, keberadaan sub kegiatan pengawasan ini menjadi bagian integral dalam memastikan bahwa capaian program prioritas pembangunan daerah tidak hanya terukur secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas, akuntabel, dan berkelanjutan.

Adapun sub kegiatan prioritas yang mendukung program prioritas Pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program  
Prioritas Pembangunan Daerah

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Optimalisasi SPIP	Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
			Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	



		Pemerintahan yang meningkat	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
			Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
			Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	
			Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
			Sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
			Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	

Dengan demikian, sub kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat bukan hanya sekedar menjalankan fungsi pengawasan rutin, melainkan juga menjadi instrumen penting dalam mengawal keberhasilan program prioritas pembangunan daerah. Setiap sub kegiatan diarahkan untuk memberikan nilai tambah berupa peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan secara berkelanjutan.

#### **4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Balikpapan**

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 tidak hanya diukur dari tersusunnya program dan kegiatan, tetapi juga harus tercermin dalam pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dirumuskan. IKU berfungsi sebagai tolok ukur utama dalam menilai sejauh mana tujuan dan sasaran strategis Inspektorat dapat direalisasikan selama periode perencanaan lima tahun ke depan.

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Kota Balikpapan memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, indikator kinerja utama yang ditetapkan harus mampu menggambarkan tingkat kapabilitas dan efektivitas pengawasan intern, kualitas implementasi SPIP, kepatuhan perangkat daerah terhadap tindak lanjut hasil pengawasan, serta kontribusi Inspektorat dalam mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah (SAKIP).

Lebih jauh, penetapan IKU ini juga selaras dengan target pembangunan nasional dan target kinerja Pemerintah Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam RPJPD dan RPJMD. Dengan adanya IKU yang jelas, terukur, dan realistis, diharapkan Inspektorat dapat lebih fokus dalam mengarahkan sumber daya, mengoptimalkan pemanfaatan anggaran, serta memastikan bahwa setiap langkah pengawasan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rincian indikator kinerja utama (IKU) Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025–2029, beserta target capaian tahunannya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4  
Indikator Kinerja Utama Inspektorat

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3,025	3,050	3,075	3,100	3,125	3,150	
2	Nilai AKIP Inspektorat	Nilai	81,92	81,97	82,02	82,07	82,12	82,17	

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama Inspektorat yaitu :

1. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan Inspektorat dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Kapabilitas APIP dinilai berdasarkan *Internal Audit Capability Model (IACM)* yang mencakup aspek peran pengawasan, metodologi audit, tata kelola, manajemen SDM, serta pemanfaatan teknologi. Semakin tinggi level kapabilitas yang dicapai, semakin besar pula kemampuan Inspektorat untuk memberikan layanan *assurance*, konsultasi, serta menjadi *early warning system* bagi pemerintah daerah. Target yang ditetapkan adalah peningkatan Kapabilitas APIP dari Level 3 (*Integrated*) menjadi Level 4 (*Managed and Measured*) pada akhir periode Renstra 2025–2029, sehingga Inspektorat dapat berperan lebih strategis dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat

Nilai AKIP merupakan indikator yang menggambarkan sejauh mana Inspektorat mampu menerapkan sistem akuntabilitas

kinerja dalam perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi program maupun kegiatannya. Penilaian AKIP dilakukan melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh tim evaluator Inspektorat Kota Balikpapan.

Semakin tinggi nilai AKIP yang diperoleh, semakin baik pula akuntabilitas kinerja Inspektorat sebagai perangkat daerah. Target Renstra adalah meningkatkan nilai AKIP Inspektorat pada kategori “A” (sangat baik) dengan capaian nilai pada tahun 2025 yaitu 81,92 menjadi 82,17 pada tahun 2030, sehingga Inspektorat tidak hanya menjadi pengawas bagi perangkat daerah lain, tetapi juga mampu memberikan teladan dalam penerapan prinsip akuntabilitas kinerja.

#### **4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan intern pemerintah, Inspektorat Kota Balikpapan memiliki tanggung jawab strategis untuk mendukung keberhasilan urusan pemerintahan bidang pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berfungsi sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan selama periode Renstra 2025–2029.

IKK dirumuskan untuk menggambarkan kinerja substantif Inspektorat dalam memberikan layanan pengawasan, pembinaan, dan konsultasi kepada perangkat daerah. Berbeda dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menilai keberhasilan pencapaian tujuan strategis organisasi secara keseluruhan, IKK lebih berorientasi pada capaian teknis dan operasional yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

Penetapan IKK Inspektorat Kota Balikpapan mengacu pada pedoman Kementerian Dalam Negeri dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga indikator yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dan akuntabel. Melalui IKK ini, kinerja penyelenggaraan urusan

pengawasan dapat dinilai secara objektif dan terukur, baik dalam aspek pencegahan, deteksi, maupun penindakan penyimpangan tata kelola pemerintahan daerah.

Adapun IKK Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 diarahkan untuk mengukur antara lain:

Tabel 4.6

Indikator Kinerja Kunci

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Maturitas SPIP	Nilai	3,317	3,342	3,367	3,392	3,417	3,442	Indikator Tujuan
2	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	3,025	3,050	3,075	3,100	3,125	3,150	Indikator Sasaran
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,92	81,97	82,02	82,07	82,12	82,17	Indikator Sasaran
4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Persentase	92,5	92,8	93,1	93,4	93,7	94	Indikator Program
5	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	3,71	3,73	3,75	3,77	3,8	3,82	Indikator Program
6	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	Nilai	3,68	3,69	3,72	3,74	3,77	3,79	Indikator Program
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	88	88,25	88,5	88,75	89	89,25	Indikator Program

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8	Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) >= B	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	Indikator Kinerja Daerah

Dengan adanya indikator-indikator kunci tersebut, diharapkan kinerja Inspektorat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengawasan dapat terukur secara komprehensif. Lebih jauh, pencapaian target IKK selama periode 2025–2029 akan menjadi bukti kontribusi nyata Inspektorat dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota Balikpapan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, program, serta kegiatan pengawasan intern dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat berjalan secara efektif, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Melalui Renstra ini, Inspektorat Kota Balikpapan berkomitmen untuk meningkatkan kapabilitas APIP, memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mengoptimalkan tindak lanjut hasil pengawasan, memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Renstra ini sekaligus menjadi komitmen bersama seluruh jajaran Inspektorat Kota Balikpapan untuk bekerja lebih profesional, adaptif, dan kolaboratif, dengan tetap menjunjung tinggi integritas dalam setiap pelaksanaan tugas pengawasan. Diharapkan dengan adanya dokumen ini, peran Inspektorat tidak hanya terbatas pada fungsi pengawasan, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan dilandasi semangat pengabdian dan integritas yang tinggi, Inspektorat Kota Balikpapan siap memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan.

## **5.2 Saran**

Agar pelaksanaan Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 dapat berjalan efektif, terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Komitmen pimpinan daerah dan seluruh jajaran perangkat daerah sangat dibutuhkan untuk mendukung implementasi program dan kegiatan pengawasan yang telah ditetapkan.
2. Penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah perlu terus ditingkatkan agar pengawasan intern mampu memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap pencapaian program prioritas pembangunan daerah.
3. Ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan, terutama dalam peningkatan kapabilitas APIP, penerapan SPIP, serta pengembangan sistem pengawasan berbasis digital.
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan ketercapaian target kinerja, sekaligus menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pengawasan intern.
5. Dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan termasuk legislatif, BPKP, BPK, dan Aparat Penegak Hukum (APH) sangat penting dalam menjaga sinergi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan pemerintahan daerah.

Dengan melaksanakan saran-saran tersebut, diharapkan Inspektorat Kota Balikpapan mampu memperkuat perannya sebagai lembaga pengawasan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani masyarakat



## AB. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di daerah.

Sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kota Balikpapan memiliki posisi strategis baik secara geografis maupun sosial politik. Kondisi ini memberikan peluang sekaligus tantangan dalam menjaga stabilitas politik, kerukunan antar umat beragama, ketahanan bangsa, serta ketertiban masyarakat. Dinamika pertumbuhan penduduk, arus urbanisasi, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya partisipasi politik masyarakat juga berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, konflik horizontal, maupun permasalahan kebangsaan lainnya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan dituntut untuk hadir sebagai fasilitator, mediator, dan katalisator dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara, memperkuat wawasan kebangsaan, serta menciptakan kondisi daerah yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga berperan dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang demokratis, peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik, penguatan kelembagaan organisasi kemasyarakatan, serta pencegahan potensi konflik sosial di daerah.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 berlandaskan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta berpedoman pada visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan. Dengan demikian, dokumen Renstra ini diharapkan mampu menjadi acuan strategis dalam merumuskan kebijakan, menyelaraskan program dan kegiatan, serta mengukur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara lebih terarah, terukur, dan akuntabel.

#### 1.2. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- 6) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025–2029.
- 7) Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

### 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

#### a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan dimaksudkan sebagai:

- 1) Pedoman arah kebijakan, strategi, dan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam jangka menengah lima tahunan.
- 2) Acuan bagi perumusan Rencana Kerja (Renja) tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, provinsi, dan nasional.
- 3) Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terukur, sistematis, dan akuntabel.

#### b. Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan bertujuan untuk:

- 1) Menjabarkan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan ke dalam kebijakan operasional perangkat daerah.
- 2) Menentukan arah pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik, termasuk upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial, pembinaan ideologi Pancasila, serta penguatan wawasan kebangsaan.
- 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 4) Mendorong terciptanya stabilitas politik, kondusivitas daerah, serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi dan kebangsaan.
- 5) Menjadi dasar evaluasi kinerja secara periodik serta bahan dalam menyusun kebijakan di periode perencanaan berikutnya.

## 1.1 Sistematika Penulisan Renstra

- **Bab I Pendahuluan**, berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan.
- **Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**, menguraikan tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pelayanan.
- **Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**, memuat identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, analisis lingkungan strategis, serta penentuan isu strategis perangkat daerah.
- **Bab IV Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**, yang menjabarkan visi, misi kepala daerah dalam RPJMD ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah.
- **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**, memuat strategi pencapaian tujuan dan sasaran serta arah kebijakan perangkat daerah.
- **Bab VI Rencana Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja**, berisi uraian program dan kegiatan beserta indikator, target, lokasi, kelompok sasaran, serta keterkaitannya dengan prioritas pembangunan daerah maupun nasional.
- **Bab VII Indikator Kinerja Perangkat Daerah**, yang memuat indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja sasaran (IKS), dan indikator kinerja program dan kegiatan (IKP/K).
- **Bab VIII Penutup**, berisi kesimpulan umum serta harapan dan komitmen pelaksanaan Renstra.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Perwali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik memiliki fungsi dan tugas yaitu

**Bagian Kesatu Kepala Badan** Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah. Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;

Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan, pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian:

- a. penyusunan program;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. kepegawaian;
- d. rumah tangga kantor;
- e. perlengkapan;
- f. protokol;

- g. hubungan masyarakat;
- h. layanan informasi dan pengaduan;
- i. pembinaan pelayanan publik;
- j. kearsipan;
- k. surat menyurat;
- l. evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran Dinas;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. pembinaan dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik;
- k. pengelolaan survei kepuasan masyarakat;
- l. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- m. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pembantu;
- n. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi; melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (tugas merumuskan perencanaan dan mengendalikan pelaksanaan sebagian tugas Badan di bidang:

- a. ideologi;
- b. wawasan kebangsaan;
- c. bela negara;
- d. karakter bangsa;
- e. pembauran kebangsaan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. sejarah kebangsaan;
- h. ketahanan ekonomi;
- i. sosial;
- j. budaya;
- k. fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;

- l. fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini;
- m. fasilitasi kerjasama intelijen;
- n. fasilitasi pemantauan orang asing;
- o. fasilitasi tenaga kerja asing dan Lembaga asing;
- p. fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
- q. fasilitasi kewaspadaan perbatasan antar negara; dan
- r. fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan

ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang:

- a. pendidikan politik;
- b. etika budaya politik;
- c. peningkatan demokrasi;
- d. fasilitasi kelembagaan pemerintahan;
- e. fasilitasi perwakilan dan partai politik;
- f. fasilitasi pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah;
- g. fasilitasi pemantauan situasi politik;
- h. pendaftaran organisasi kemasyarakatan;
- i. pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;
- j. evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan; dan
- k. pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.

Bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa

organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;

- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya Subbidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud.

Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan per 30 September 2025 memiliki sumber daya manusia sebanyak 31 orang, terdiri dari PNS sebanyak 20 orang, PPPK 7 orang, dan Non PNS 4 orang yang secara rinci dijabarkan dalam tabel berikut ini:



**Tabel 2.1 Data Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
Per 30 September 2025

Jabatan	Golongan				Sub	Pendidikan						Sub	Jenis Kelamin	
	IV	III	II	I	Total	S-2	S-1/ D-4	D3	SMA	SMP	SD	Total	L	P
Kepala Badan	1				1	1						1	1	
Sekretaris Badan	1				1	1						1	1	
Kepala Bidang		2			2	2						2	1	1
Kepala Sub Bidang/ Sub Bagian	1	4			5	1	3	1				5	3	2
Pelaksana		8	3		11		4	2	5			11	6	5
PPPK					7		1	1	4	1		7	3	4
<b>Jumlah PNS/PPPK</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>1</b>		<b>27</b>		
Non PNS					4		2		2			4	1	3
<b>Total SDM PNS/PPPK+ Non PNS</b>	<b>31 Orang</b>													

Sumber : Badan Kesbangpol

a. Sarana dan Prasarana

Provinsi

Kab./Kota

Bidang

Unit Organisasi

KESBANG DAN POLITIK

: PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

: PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

: Bidang Kesatuan Bangsa

: BADAN KESBANG DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi

: BADAN KESBANG DAN POLITIK

U P B

: BADAN

NOMOR		SPESIFIKASI BARANG		Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P, S, D)	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
Urut		Nama / Jenis Barang	Merk/ Type					Barang	Harga
1		4	5	6	9	10	12	13	14
1		Ranai Bangunan Kantor Pemerintah	-	Pembelian	1990	1300	Baik	1	130.000.000,00
2		Portable Generating Set	-	Pembelian	2006		Rusak Berat	1	4.250.000,00
3		Portable Generating Set	Honda Exell / SF7000 XE	Pembelian	2009	Besar	Baik	1	15.000.000,00
4		Station Wagon	-	Pembelian	1994		Rusak berat	1	50.000.000,00
5		Station wagon	toyota	Pembelian	2001		Kurang Baik	1	80.000.000,00
6		Station Wagon	Toyota / Kijang	Pembelian	2004		Kurang Baik	1	100.000.000,00
7		Station Wagon	Suzuki / GC415V APV STD	Pembelian	2009	1.493 CC	Baik	1	116.000.000,00
8		Station Wagon	Toyota /	Pembelian	2009		Rusak berat	1	177.672.090,00
9		Station Wagon	Avanza 1500 S Toyota New Rush 1.5 S A/T GR Sport VIN 2021	Pembelian	2021		Baik	1	246.400.000,00
10		Station Wagon	Toyota New Rush 1.5 S A/T GR Sport VIN 2021	Pembelian	2021		Baik	1	246.400.000,00
11		Station Wagon	Toyota New Rush 1.5 S A/T GR Sport VIN 2021	Pembelian	2021		Baik	1	246.400.000,00
12		Pick Up	New CarryPick up WD AC PS / manual	Pembelian	2023		Baik	1	170.900.000,00
13		Sepeda Motor	-	Pembelian	1996		Rusak Berat	2	8.000.000,00
14		Sepeda motor	Suzuki /	Pembelian	1999	100 CC	Kurang Baik	1	4.500.000,00
15		Sepeda Motor	Tornado Suzuki /	Pembelian	2003	110 CC	Kurang Baik	1	7.000.000,00
16		Sepeda Motor	FD110 XCSD Suzuki / FD110 XCSD	Pembelian	2003	110 CC	Kurang Baik	1	7.000.000,00
17		Sepeda motor	Suzuki /	Pembelian	2006	110 CC	Kurang Baik	1	7.000.000,00
18		Sepeda Motor	FD110XCSD Suzuki /	Pembelian	2006	110 CC	Kurang Baik	1	7.000.000,00
19		Sepeda Motor	FD110XCSD -	Pembelian	2008		Rusak Berat	2	28.020.000,00
20		Sepeda Motor	Kanzen / RT	Pembelian	2008	110 CC	Kurang Baik	1	11.000.000,00

21	Sepeda Motor	110 Taurus Yamaha / Vega	Pembelian	2009	115 cc	Kurang baik	1	4.050.000,00
22	Sepeda Motor	ZR Kanzen KT.	Pembelian	2009		Rusak berat	1	11.000.000,00
23	Sepeda Motor	110 Yamaha / Jupiter Z	Pembelian	2010	115 cc	Baik	1	12.965.700,00
24	Sepeda Motor	kawasaki / kawasaki KLX 150 S	Pembelian	2023		Baik	1	33.455.000,00
25	Sepeda Motor	kawasaki / kawasaki KLX 150 S	Pembelian	2023		Baik	1	33.455.000,00
26	Sepeda Motor	Honda Vario / 160 cbs	Pembelian	2023		Baik	1	27.438.886,00
27	Sepeda Motor	Honda Vario / 160 cbs	Pembelian	2023		Baik	1	27.438.886,00
28	Sepeda Motor	Honda Vario / 160 cbs	Pembelian	2023		Baik	1	27.438.886,00
29	Sepeda Motor	Honda Vario / 160 cbs	Pembelian	2023		Baik	1	27.438.886,00
30	Sepeda Motor	Honda / Vario 160 CBS	Pembelian	2024		Baik	1	28.580.000,00
31	Sepeda Motor	Honda / vario	Pembelian	2024		Baik	1	28.580.000,00
32	Gerobak Dorong	160 CBS -	Pembelian	2015		Baik	1	425.000,00
33	Gergaji Chain Saw	MS 180	Pembelian	2022		Baik	1	4.950.000,00
34	Mesin Ketik Manual Standard (14- 10 Inci)	-	Pembelian	2005		Rusak berat	1	1.275.000,00
35	Mesin Ketik Manual Standard (14- 10 Inci)	OLIMPIA	Pembelian	2016		Baik	1	2.289.500,00
36	Mesin ketik lainnya (dst)	-	Pembelian	2005		Rusak berat	1	1.275.000,00
37	Mesin Fotocopy Folio	Fujifilm Apeos / 2560 CPS	Pembelian	2024		Baik	1	92.500.000,00
38	Lemari Besi/Metal	-	Pembelian	2005		Rusak Berat	2	2.000.000,00
39	Lemari Besi/Metal	Lion / 2 Pintu	Pembelian	2012		Baik	2	7.260.000,00
40	Lemari Besi/Metal	-	Pembelian	2013		Baik	2	5.100.000,00
41	Lemari Besi/Metal	VIP / DUA PINTU	Pembelian	2015		Baik	2	5.800.000,00
42	Lemari Kayu	-	Pembelian	2001		Rusak berat	1	6.120.000,00
43	Lemari kayu	-	Pembelian	2005		Rusak berat	1	2.550.000,00
44	Lemari Kayu	- / bahan kayu	Pembelian	2019		Baik	1	5.200.000,00
45	Lemari Kayu	- / Bahan Kayu	Pembelian	2019		Baik	1	4.150.000,00
46	Lemari Kayu	costum	Pembelian	2024		Baik	1	11.850.000,00
47	Rak Besi	custem	Pembelian	2023		Baik	5	18.037.500,00
48	Rak Besi	Rak Frey 5 Shelves	Pembelian	2024		Baik	1	850.000,00
49	Rak Kayu	Lokal / -	Pembelian	2001	2x2	Kurang Baik	1	850.000,00
50	Rak Kayu	Activ / -	Pembelian	2009	-	Baik	2	819.000,00
51	Rak Kayu	-	Pembelian	2016		Baik	4	5.904.500,00
52	Rak Kayu	- / Standing	Pembelian	2019		Baik	1	2.250.000,00
53	Filing Cabinet Besi	-	Pembelian	2000		Rusak berat	1	1.530.000,00
54	Filing Cabinet Besi	-	Pembelian	2005		Rusak berat	1	3.060.000,00
55	Filing Cabinet Besi	Lion / 3 pintu	Pembelian	2009	-	Baik	1	2.691.000,00
56	Filing Cabinet Besi	VIP / 4 pintu	Pembelian	2010	-	Baik	2	5.000.000,00
57	Filing Cabinet Besi	Filing Cabinet / LEMARI BESI	Pembelian	2015		Baik	1	3.500.000,00
58	Filing Cabinet Besi	VIP / bahan besi	Pembelian	2019		Baik	1	4.200.000,00
59	Brandkas	President / 20"	Pembelian	2000	-	Kurang baik	1	6.375.000,00
60	Brandkas	INDACHI / BG - 120 000059	Pembelian	2015	49 x 58 CM	Baik	1	9.720.000,00
61	Locker	custem	Pembelian	2023		Baik	1	6.937.500,00

62	CCTV - Camera Control Television System	HIK Vision / Outdoor Infra red	Pembelian	2019		Baik	2	1.100.000,00
63	CCTV - Camera Control Television System	HIK Vision / Indoor Infra red	Pembelian	2019		Baik	5	2.500.000,00
64	CCTV - Camera Control Television System	HIK Vision / PTZ Motorik	Pembelian	2019		Baik	1	6.000.000,00
65	CCTV - Camera Control Television System	HIK / DVR 8ch	Pembelian	2019		Baik	1	7.350.000,00
66	CCTV - Camera Control Television System	PTZ-WIFI / kamera hd 2 ttk	Pembelian	2024		Baik	2	4.170.000,00
67	White Board	V-TEC / -	Pembelian	2011	-	Baik	10	5.750.000,00
68	White Board	-	Pembelian	2015		Baik	8	28.000.000,00
69	Alat Penghancur Kertas	GEMET 1000S	Pembelian	2011		Baik	1	1.500.000,00
70	Alat Penghancur Kertas	Kozure KS-9600c	Pembelian	2024		Baik	1	7.500.000,00
71	Mesin Absensi	SOLUTION/X30 2 / 1 PAKET KOMPUTER DAN MESIN	Pembelian	2013		Baik	1	18.700.000,00
72	Mesin Absensi	solution x802 / infrared	Pembelian	2021		Baik	1	14.960.000,00
73	LCD Projector/Infocus	Epson EB X-51 / Wifi	Pembelian	2021		Baik	1	11.319.000,00
74	Papan Pengumuman	custem	Pembelian	2024		Baik	1	32.412.000,00
75	Alat Kantor Lainnya	-	Pembelian	2016		Baik	2	8.856.750,00
76	Meja Kerja Kayu	- / blocktick 18 mm cat duco silver	Pembelian	2021		Baik	1	3.168.000,00
77	Meja Kerja Kayu	- / blocktick 18 mm cat duco silver	Pembelian	2021		Baik	3	9.504.000,00
78	Meja Kerja Kayu	custem	Pembelian	2023		Baik	5	8.325.000,00
79	Meja Kerja Kayu	costum	Pembelian	2024		Baik	1	15.400.000,00
80	Meja Rapat	Lokal / -	Pembelian	2008	Panjang	Baik	1	7.020.000,00
81	Meja Rapat	- / bahan kayu	Pembelian	2019		Baik	1	12.750.000,00
82	Meja Resepsionis	Custem	Pembelian	2024		Baik	1	8.500.000,00
83	Meja 1/2 Biro	-	Pembelian	1994		Rusak berat	1	800.000,00
84	Meja 1/2 Biro	-	Pembelian	1998		Rusak berat	1	3.570.000,00
85	Meja 1/2 Biro	-	Pembelian	2001		Rusak berat	1	400.000,00
86	Meja 1/2 Biro	-	Pembelian	2006		Rusak berat	1	3.000.000,00
87	Meja 1/2 Biro	Lokal / -	Pembelian	2009	-	Baik	2	2.500.000,00
88	Kursi Rapat	bufalo	Pembelian	2023		Baik	21	10.489.500,00
89	Kursi Tamu	-	Pembelian	2000		Rusak berat	1	680.000,00
90	Kursi Tamu	-	Pembelian	2016		Baik	4	1.997.892,00
91	Kursi Tamu	Custom	Pembelian	2022		Baik	1	7.150.000,00
92	Kursi Putar	-	Pembelian	2001		Rusak Berat	2	765.000,00
93	Kursi Putar	-	Pembelian	2005		Rusak berat	1	4.207.500,00
94	Kursi Putar	-	Pembelian	2006		Rusak Berat	2	2.295.000,00
95	Kursi Putar	frontline	Pembelian	2015		Baik	1	750.000,00
96	Kursi Putar	frontline	Pembelian	2015		Baik	2	1.500.000,00
97	Kursi Putar	frontline	Pembelian	2015		Baik	1	750.000,00
98	Kursi Putar	-	Pembelian	2016		Baik	5	7.983.125,00
99	Kursi Lipat	-	Pembelian	2016		Baik	35	12.230.750,00

100	Kursi Dapat	Chitose / npat	Pembelian	2019		Baik	20	13.000.000,00
101	Meja Komputer	-	Pembelian	2006		Rusak Berat	1	552.500,00
102	Sofa	BIG TOP/COKLAT / SHAPE PREMIUM QUALITY	Pembelian	2021		Baik	1	8.800.000,00
103	Sofa	Desian Modern lynden set Sofa / set	Pembelian	2024		Baik	2	31.890.000,00
104	Jam Elektronik	-	Pembelian	2005		Rusak Berat	2	200.000,00
105	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	- / -	Pembelian	2015		Baik	1	350.000,00
106	Mesin Pemotong Rumput	SHIROZI	Pembelian	2015		Baik	1	2.400.000,00
107	Alat Pembersih lainnya	hitachi / economic filter	Pembelian	2023		Baik	1	2.220.000,00
108	Lemari Es	Sanyo /	Pembelian	2006	Mini	Kurang Baik	1	2.550.000,00
109	Lemari Es	Portable Sharp / 1 pintu refrigerator /	Pembelian	2010	-	Baik	1	2.500.000,00
110	Lemari Es	lemon sharp	Pembelian	2022		Baik	1	3.520.000,00
111	A.C. Window	SHARP 1 PK / AH - A5MCY	Pembelian	2015		Baik	5	20.500.000,00
112	A.C. Split	-	Pembelian	2005		Rusak Berat	2	3.910.000,00
113	A.C. Split	-	Pembelian	2007		Rusak Berat	1	1.955.000,00
114	A.C. Split	Changhong /	Pembelian	2011	2 PK	Baik	1	6.000.000,00
115	A.C. Split	Split Changhong /	Pembelian	2011	2 PK	Baik	1	6.000.000,00
116	A.C. Split	Split PANASONIC / CS-YC9NKJ	Pembelian	2015		Baik	2	8.400.000,00
117	A.C. Split	SAMSUNG	Pembelian	2016		Baik	2	9.492.990,00
118	A.C. Split	Panasonic / Wall Mounted Split	Pembelian	2020		Baik	4	33.880.000,00
119	A.C. Split	panasonic / split 2 pk	Pembelian	2021		Baik	2	17.820.000,00
120	A.C. Split	Panasonic / 1 PK	Pembelian	2023		Baik	1	5.400.000,00
121	A.C. Split	Panasonic / split	Pembelian	2024		Baik	1	7.750.000,00
122	Kipas Angin	MASPION /	Pembelian	2013		Baik	2	960.000,00
123	Kipas Angin	WALL FAN UCHIDA / CF-240	Pembelian	2013		Baik	1	480.000,00
124	Kompор Gas (Alat Dapur)	RINNAI / RI-522C	Pembelian	2013		Baik	1	650.000,00
125	Treng Air/Tandon Air	GENTONG AIR	Pembelian	2013		Baik	1	400.000,00
126	Alat Dapur lainnya	IGLO	Pembelian	2013		Baik	1	382.000,00
127	Televisi	-	Pembelian	2004		Rusak Berat	1	935.000,00
128	Televisi	Sony / Muity	Pembelian	2005	29 inch	Kurang Baik	1	3.400.000,00
129	Televisi	System Stereo -	Pembelian	2005		Rusak Berat	1	935.000,00
130	Televisi	LG /	Pembelian	2006	21 inch	Kurang Baik	1	1.785.000,00
131	Televisi	Color/flatron Sharp / -	Pembelian	2007	21 inch	Kurang Baik	1	1.785.000,00
132	Televisi	Samsung / LED	Pembelian	2015	32 "	Baik	1	4.210.000,00
133	Televisi	TOSHIBA / LED	Pembelian	2015	21"	Baik	1	3.200.000,00
134	Televisi	LG / LED	Pembelian	2019		Baik	1	2.800.000,00
135	Televisi	samsung / smart TV	Pembelian	2021		Baik	1	12.188.000,00
136	Televisi	Samsung / Smart TV	Pembelian	2022		Baik	2	13.320.000,00
137	Televisi	samsung	Pembelian	2023		Baik	1	10.323.000,00
138	Televisi	samsung / plus bracket	Pembelian	2023		Baik	1	144.133.500,00
139	Televisi	samsung	Pembelian	2023		Baik	1	17.038.500,00

140	Sound System	Soundrenaline / SP-150	Pembelian	2009	-	Baik	1	10.000.000,00
141	Sound System	Yamaha VSA	Pembelian	2024		Baik	1	28.300.000,00
142	Wireless	-	Pembelian	2013		Baik	1	1.738.000,00
143	Microphone	Soundbest	Pembelian	2023		Baik	8	6.993.000,00
144	Unit Power Supply	PS / PS-30	Pembelian	2019		Baik	1	850.000,00
145	Stabilisator	ICA CE 1200 / UPS S/N 1B1D21401694	Pembelian	2014		Baik	3	4.737.727,00
146	Camera video	Canon EDS70D	Pembelian	2014		Baik	1	15.280.000,00
147	Camera film	+ Lens / EDS 70D / DS 126411 -	Pembelian	2006		Rusak berat	1	3.400.000,00
148	Camera film	Sony / W290	Pembelian	2009	-	Baik	2	9.400.000,00
149	Alat Hiasan	-	Pembelian	2013		Baik	1	575.000,00
150	Tiang Bendera	custem / kayu jati	Pembelian	2024		Baik	2	3.700.000,00
151	Tangga Aluminium	-	Pembelian	2012		Baik	1	3.500.000,00
152	Dispenser	-	Pembelian	2005		Rusak berat	1	300.000,00
153	Dispenser	-	Pembelian	2007		Rusak Berat	2	1.350.000,00
154	Dispenser	SANKEN	Pembelian	2013		Baik	2	1.000.000,00
155	Dispenser	MIYAKO / HOT & COOL	Pembelian	2013		Baik	1	500.000,00
156	Dispenser	sanken / Hot and cool	Pembelian	2021		Baik	2	8.536.440,00
157	Dispenser	sanken / 220 v	Pembelian	2021		Baik	1	4.265.220,00
158	Dispenser	Sanken	Pembelian	2022		Baik	2	7.920.000,00
159	Dispenser	Sanken / 4	Pembelian	2024		Baik	1	3.700.000,00
160	Handy Cam	-	Pembelian	2006		Rusak Berat	2	17.375.000,00
161	Handy Cam	CMIT	Pembelian	2012		Baik	1	7.953.000,00
162	Handy Cam	Canon / LEGRIA HF/R36	Pembelian	2014		Baik	1	4.250.000,00
163	Handy Cam	Canon / LEGRIA HF/R36	Pembelian	2014		Baik	1	4.250.000,00
164	Handy Cam	Canon / LEGRIA HF/R36	Pembelian	2014		Baik	1	4.250.000,00
165	Handy Cam	Canon / LEGRIA HF/R36	Pembelian	2014		Baik	1	4.250.000,00
166	Handy Cam	Canon / LEGRIA HF/R36	Pembelian	2014		Baik	1	4.250.000,00
167	Gordyin/Kray	Kain Onyc	Pembelian	2012		Baik	1	7.200.000,00
168	Gordyin/Kray	WARNA COKLAT MUDA POLOS	Pembelian	2015	10 M	Baik	10	3.600.000,00
169	Gordyin/Kray	Custom	Pembelian	2022		Baik	1	31.635.000,00
170	Tangga	Stadex / 8,2 M	Pembelian	2021		Baik	1	7.653.360,00
171	Bracket Standing Peralatan	nort bayou stand bracket NB	Pembelian	2023		Baik	1	2.752.800,00
172	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Krisbow / 18	Pembelian	2024		Baik	2	4.550.000,00

173	Alat Pemadam/Portable	M2 Cadr 150 M3/jam Fire ACE / FA-55 P	Pembelian	2007	55 Kg	Baik	1	8.100.000,00
174	Generator Busa	BIG POWER /  ET7000 LE	Pembelian	2014	KW 2000532	Baik	1	8.750.000,00
175	Meja Kerja Pejabat lain-lain	-	Pembelian	2016		Baik	3	8.856.750,00
176	Kursi Kerja Pejabat lainnya	savello / hidrolik	Pembelian	2020		Baik	10	19.635.000,00
177	Kursi Kerja Pejabat lainnya	inco	Pembelian	2021		Baik	10	18.480.000,00
178	Kursi Kerja Pejabat lainnya	custem	Pembelian	2023		Baik	5	9.157.500,00
179	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	CHITOSE / KURSI LIPAT	Pembelian	2013		Baik	16	5.920.000,00
180	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	BIG TOP / HITAM BUNGA - BUNGA	Pembelian	2015		Baik	1	4.100.000,00
181	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/ Wakil	2 pintu	Pembelian	2011		Baik	1	1.325.000,00
182	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	-	Pembelian	2001		Rusak berat	1	500.000,00
183	Dinamis Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	-	Pembelian	2005		Rusak berat	1	3.000.000,00
184	Dinamis Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	VIP / -	Pembelian	2009	-	Baik	2	7.254.000,00
185	Dinamis Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	2 pintu	Pembelian	2011		Baik	2	6.000.000,00
186	Dinamis Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	Activ	Pembelian	2011		Baik	1	1.325.000,00
187	Dinamis Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	Pro Design /	Pembelian	2011		Baik	1	6.000.000,00
188	Dinamis Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	Besar 4 pintu,4 rak,4 laci VIP	Pembelian	2012		Baik	1	3.000.000,00
189	Dinamis Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	-	Pembelian	2016		Baik	3	8.947.125,00
190	Dinamis Lemari Arsip Pejabat lainnya	Custom	Pembelian	2022		Baik	2	8.140.000,00
191	Uninterruptible Power Supply (UPS)	-	Pembelian	2015		Baik	3	2.100.000,00
192	Uninterruptible Power Supply (UPS)	-	Pembelian	2016		Baik	3	4.428.375,00
193	Uninterruptible Power Supply (UPS)	- /	Pembelian	2020		Baik	3	5.775.000,00
194	peralatan studio audio lainnya (dst)	1200VA/600W Nikkon	Pembelian	2012		Baik	1	5.255.000,00
195	peralatan studio audio lainnya (dst)	FOUJIFILM	Pembelian	2015		Baik	3	5.865.000,00
196	Camera Electronic	FINEPIX 54600 / SN/3WJ07827, SN/3WJ07796, SN/3WG51230	Pembelian	2012		Baik	1	6.248.000,00
197	Camera Electronic	Epson LCD	Pembelian	2014		Baik	1	14.350.000,00
198	Camera Electronic	Canon EOS 60 D + lens 0801108552 / DS126281 / 2881421084	Pembelian	2014		Baik	1	14.350.000,00
199	Camera Electronic	Canon EOS 60 D + lens 0801108554 / DS126281 / 2881421086	Pembelian	2014		Baik	1	14.350.000,00
200	Video Monitor	Canon EOS 60 D + lens 0801108551 / DS126281 / 2881421087	Pembelian	2023		Baik	1	1.480.000.000,00
201	Layar Film/Projector	custom Toshiba /  TDP-S8	Pembelian	2001	Kecil	Baik Kurang Baik	1	6.800.000,00
202	Layar Film/Projector	microvision	Pembelian	2021		Baik	1	5.199.700,00
203	Camera Conference	Logitech Rally Plus	Pembelian	2023		Baik	1	57.165.000,00
204	Telephone (PABX)	Panasonic / KX-TES824	Pembelian	2024		Baik	1	15.350.000,00
205	Pesawat Telephone	-	Pembelian	2005		Rusak	1	255.000,00

206	Handy Talky (HT)	Motorola	Pembelian	2012		Berat Baik	3	8.910.000,00
207	Handy Talky (HT)	Hytera	Pembelian	2024		Baik	4	33.200.000,00
208	Handy Talky (HT)	Hytera	Pembelian	2024		Baik	6	49.800.000,00
209	Facsimile	-	Pembelian	2005		Rusak Berat	1	1.360.000,00
210	Facsimile	Panasonic / FT-983	Pembelian	2009	-	Baik	1	2.000.000,00
211	Facsimile	PANASONIC / KX - FT 983CX ( BLACK )	Pembelian	2015		Baik	1	2.800.000,00
212	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	Motorola / M-3688	Pembelian	2019		Baik	1	8.300.000,00
213	Unit Tranceiver FM	Yaesu	Pembelian	2012		Baik	1	4.840.000,00
214	Unit Tranceiver UHF Portable	Yaesu VX-6R / TribandH/L	Pembelian	2020		Baik	3	16.335.000,00
215	alat komunikasi radio uhf lainnya	Weierwei /	Pembelian	2019		Baik	8	8.600.000,00
216	(dst) Wireless Amplifier	UV-V9 Kertz / Aux,tuner,MP3, Mic	Pembelian	2019		Baik	1	6.600.000,00
217	alat komunikasi sosial lainnya (dst)	Sony Recorder	Pembelian	2012		Baik	1	1.650.000,00
218	alat komunikasi sosial lainnya (dst)	Sony voice Recorder	Pembelian	2012		Baik	2	3.300.000,00
219	alat komunikasi lainnya lainnya (dst)	Dji Mavic 2 /	Pembelian	2021		Baik	1	54.175.000,00
220	Antene UHF Stationary	dual Thermal Base Station / HyGain	Pembelian	2019		Baik	1	950.000,00
221	Alat Kedokteran umum lainnya	Ynwell / Infrared Digital	Pembelian	2020		Baik	1	1.500.000,00
222	Bracket Holder	samsung	Pembelian	2023		Baik	1	1.942.500,00
223	Alat Pemanas	Kris chef	Pembelian	2023		Baik	1	2.553.000,00
224	Personal Computer	DELL / Intel core i3 Processor 1215U	Pembelian	2022		Baik	1	13.800.630,00
225	Personal Computer	Asusu / pc desktop	Pembelian	2024		Baik	3	53.700.000,00
226	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst)	-	Pembelian	2000		Rusak Berat	1	200.000,00
227	recorder display lainnya (dst)	epson / i565	Pembelian	2018		Baik	3	16.335.000,00
228	Kamera Digital	Weierwei UV-V9 Tri Band	Pembelian	2023		Baik	1	16.983.000,00
229	Mainframe (Komputer Jaringan)	HP MODEL : PROLIANT ML 350P GEN 8 SERVER, MONITOR / S/N 508037-371	Pembelian	2015		Baik	1	40.350.000,00
230	P.C Unit	-	Pembelian	2000		Rusak Berat	1	5.185.000,00
231	P.C Unit	-	remoenan	2000		Rusak Berat	2	10.370.000,00
232	P.C Unit	PC Asus	Pembelian	2012		Baik	1	5.500.000,00
233	P.C Unit	HP	Pembelian	2012		Baik	1	6.600.000,00
234	P.C Unit	-	Pembelian	2012		Baik	1	3.000.000,00
235	P.C Unit	Monitor LED LG + CPU Power WSB / Monitor 49cm 20M35	Pembelian	2014		Baik	2	14.400.000,00
236	P.C Unit	Monitor LG, CPU Sun Bio / Seri : 312NDUNGV58 2	Pembelian	2014		Baik	1	7.000.000,00
237	P.C Unit	Monitor LG, CPU Sun Bio / Seri : 309/NDLWGV5 11	Pembelian	2014		Baik	1	7.000.000,00
238	P.C Unit	Monitor LG, CPU Sun Bio /	Pembelian	2014		Baik	1	7.000.000,00



239	P.C Unit	Seri : 309/NDLSGV49 6 Monitor LG, CPU Sun Bio / Seri : 312NDUNGV58 2	Pembelian	2014		Baik	1	7.000.000,00
240	P.C Unit	MONITOR AOC + CPU SPC / S/N	Pembelian	2015		Baik	1	5.300.000,00
241	P.C Unit	BTXE39A00017 0  MONITOR AOC + CPU SPC / S/N BTXE19A00010 8	Pembelian	2015		Baik	1	5.300.000,00
242	P.C Unit	MONITOR AOC + CPU SPC / S/N BTXE39A00230 2	Pembelian	2015		Baik	1	5.300.000,00
243	P.C Unit	MONITOR AOC + CPU SPC / S/N BTXE19A00010 9	Pembelian	2015		Baik	1	5.300.000,00
244	P.C Unit	MONITOR AOC + CPU SPC / S/N BTXE39A00185 6	Pembelian	2015		Baik	1	5.300.000,00
245	P.C Unit	MONITOR AOC + CPU SPC / S/N BTXE39A00124 3	Pembelian	2015		Baik	1	5.300.000,00
246	P.C Unit	MONITOR AOC + CPU SPC / S/N BTXE19A00030 5	Pembelian	2015		Baik	1	5.300.000,00
247	P.C Unit	MONITOR AOC + CPU SPC / S/N BTXE39A00088 0	Pembelian	2015		Baik	1	5.300.000,00
248	P.C Unit	MONITOR AOC + CPU SPC / S/N BTXE19A00101 6	Pembelian	2015		Baik	1	5.300.000,00
249	P.C Unit	MONITOR AOC + CPU SPC / S/N BTXE39A00011 9	Pembelian	2015		Baik	1	5.300.000,00
250	P.C Unit	MONITOR AOC + CPU SPC / S/N BTXE19A00099 8	Pembelian	2015		Baik	1	5.300.000,00
251	P.C Unit	PC. COMPUTER ( RAKITAN ) MONITOR LG MODEL : 20M37 / S/N 503NDQA4P74 0	Pembelian	2015		Baik	1	5.700.000,00
252	P.C Unit	PC. COMPUTER (RAKITAN ) MONITOR LG MODEL : 20M37A / S/N 503NDQAHL01	Pembelian	2015		Baik	1	5.700.000,00
253	P.C Unit	PC. MONITOR ( RAKITAN )	Pembelian	2015		Baik	1	5.700.000,00

		MONITOR LG MODEL : 20M37A / S/N 503ND2JHL085 PC. COMPUTER ( RAKITAN ) MONITOR LG MODEL : 20M37A / S/N 503NDMTHL04 3	Pembelian	2015		Baik	1	5.700.000,00
254	P.C Unit							
255	P.C Unit	PC.COMPUTER (RAKITAN) MONITOR LG MODEL : 20M37A / S/N 503NOZJHL061	Pembelian	2015		Baik	1	5.700.000,00
256	P.C Unit	PC.COMPUTER (RAKITAN) MONITOR LG MODEL : 20M37A / S/N 503NDPHHL00 8	Pembelian	2015		Baik	1	5.700.000,00
257	P.C Unit	hp / desktop all in one	Pembelian	2020		Baik	1	9.900.000,00
258	P.C Unit	Asus / type 1	Pembelian	2022		Baik	1	12.760.000,00
259	P.C Unit	Asus	Pembelian	2023		Baik	1	16.761.000,00
260	Lap Top	-	Pembelian	2006		Rusak Berat	2	34.000.000,00
261	Lap Top	Acer / Aspire 4920	Pembelian	2008	14 inch	Baik	1	10.000.000,00
262	Lap Top	Toshiba / Satellite L-310	Pembelian	2009	14 inch	Baik	2	16.600.000,00
263	Lap Top	Toshiba / Satellite L-310	Pembelian	2009	14 inch	Baik	1	8.300.000,00
264	Lap Top	Toshiba / Sattelite L-310	Pembelian	2009	14 inch	Baik	1	8.300.000,00
265	Lap Top	ASUS (Warna Merah) / A450/D7N0CX4 54255309	Pembelian	2014		Baik	2	17.600.000,00
266	Lap Top	monitor 14" TOSHIBA / L855/2D01487 8Q	Pembelian	2014		Rusak berat	1	8.800.000,00
267	Lap Top	TOSHIBA / L855/1D09837 4Q	Pembelian	2014		Baik	1	8.800.000,00
268	Lap Top	TOSHIBA / L855/1D09745 6Q	Pembelian	2014		Baik	1	8.800.000,00
269	Lap Top	TOSHIBA / L855/2D13883 2Q	Pembelian	2014		Rusak berat	1	8.800.000,00
270	Lap Top	TOSHIBA / L855/1D47973 3Q	Pembelian	2014		Rusak berat	1	8.800.000,00
271	Lap Top	TOSHIBA / L855/1D47916 9Q	Pembelian	2014		Baik	1	8.800.000,00
272	Lap Top	TOSHIBA / L855/2D13905 1Q	Pembelian	2014		Rusak berat	1	8.800.000,00
273	Lap Top	TOSHIBA / L855/2D14050 4Q	Pembelian	2014		Rusak Berat	1	8.800.000,00
274	Lap Top	ASUS A455L / S/N ECNOWU00578 3498	Pembelian	2015		Baik	1	12.200.000,00
275	Lap Top	ASUS A455L / S/N EBNOWU35031	Pembelian	2015		Baik	1	12.200.000,00

		9489						
276	Lap Top	ASUS A455L / S/N EBNOWU34161 2484	Pembelian	2015		Baik	1	12.200.000,00
277	Lap Top	asus	Pembelian	2018		Baik	8	72.842.000,00
278	Lap Top	ASUS / A407UF	Pembelian	2019		Baik	1	12.500.000,00
279	Lap Top	Dell	Pembelian	2020		Baik	1	13.970.000,00
280	Lap Top	HP/silver / intel core i7	Pembelian	2021		Baik	2	30.690.000,00
281	Lap Top	Lenovo / legion 5 151AH7	Pembelian	2022		Baik	1	31.968.000,00
282	Lap Top	Lenovo / window 11 home 64 single language	Pembelian	2022		Baik	1	29.492.700,00
283	Lap Top	acer	Pembelian	2023		Baik	2	37.262.700,00
284	Lap Top	HP	Pembelian	2023		Baik	3	55.611.000,00
285	Lap Top	lenovo / windows 11	Pembelian	2023		Baik	1	16.539.000,00
286	Lap Top	lenovo / windows 11	Pembelian	2023		Baik	1	16.539.000,00
287	Note Book	LENOVO E10-30 MODEL : 20424 / S/N UB02951288	Pembelian	2015		Baik	1	3.565.000,00
288	Note Book	LENOVO E10-30 MODEL : 20424 / S/N UB0323629	Pembelian	2015		Baik	1	3.565.000,00
289	Note Book	LENOVO E10-30 MODEL : 20424 / S/N UB03269901	Pembelian	2015		Baik	1	3.565.000,00
290	Note Book	LENOVO E10-30 MODEL : 20424 / S/N UB02955314	Pembelian	2015		Baik	1	3.565.000,00
291	Note Book	LENOVO E10-30 MODEL : 20424 / S/N UB02951233	Pembelian	2015		Baik	1	3.565.000,00
292	Tablet PC	Samsung Galaxy / android OS 12	Pembelian	2022		Baik	2	29.998.860,00
293	Tablet PC	Samsung / Galaxy Note S-8, ram 8Gb-internal 128 GB	Pembelian	2022		Baik	3	53.912.700,00
294	Tablet PC	samsung Galaxy Tab S9 5G	Pembelian	2023		Baik	2	30.053.300,00
295	Personal Komputer lainnya	dell / Black / all in one	Pembelian	2021		Baik	5	54.450.000,00
296	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	brother ADS-1700W / wifi usb cloud	Pembelian	2020		Baik	1	6.380.000,00
297	Keyboard (Peralatan Mini Komputer)	DELL	Pembelian	2011		Baik	1	400.000,00
298	CPU (Peralatan Personal Komputer)	DELL	Pembelian	2011		Baik	1	4.000.000,00
299	Monitor	DELL	Pembelian	2011		Baik	1	3.000.000,00
300	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	Pembelian	2006		Rusak berat	1	800.000,00
301	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / Deskjet F2100 Series	Pembelian	2007	Sedang	Baik	1	1.500.000,00
302	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson /	Pembelian	2009	-	Rusak	1	300.000,00

303	Komputer) Printer (Peralatan Personal Komputer)	LX-300+II EPSON / LQ  2190	Pembelian	2011		Rusak Serat	1	3.000.000,00
304	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / Pixma  MP258	Pembelian	2011	-	Rusak Serat	1	1.500.000,00
305	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / Pixma  MP258	Pembelian	2011	-	Rusak Serat	1	1.500.000,00
306	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / Pixma  MP258	Pembelian	2011	-	Rusak Serat	1	1.500.000,00
307	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / MP287  MP258	Pembelian	2012		Rusak Serat	1	1.243.000,00
308	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON / MP 237	Pembelian	2013		Baik	2	2.180.000,00
309	Printer (Peralatan Personal Komputer)	epson / L550 / Seri *SARY004879	Pembelian	2014		Baik	1	4.500.000,00
310	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L210 / SERI RAEK133467	Pembelian	2014		Baik	1	2.500.000,00
311	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L210 / seri : RAEK132853	Pembelian	2014		Baik	1	2.500.000,00
312	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L210 / SERI : RAEK127666	Pembelian	2014		Baik	1	2.500.000,00
313	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON 210 / Model C462H / RAEK137238	Pembelian	2014		Baik	1	2.675.909,00
314	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laser Jet / Type 400	Pembelian	2015		Baik	2	10.100.000,00
315	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON PIXMA IP2770/QC3-50 62 / CODE : QC3-2772-DB0 1-01	Pembelian	2015		Baik	1	700.000,00
316	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON PIXMA  IP2770 / CODE : QC3-2772-DB0 1-02	Pembelian	2015		Baik	1	700.000,00
317	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON PIXMA IP2770 / CODE : QC3-2772-DB0 1-01	Pembelian	2015		Baik	1	700.000,00
318	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON PIXMA IP2770 / CODE : QC3-2772-DB0 1-01	Pembelian	2015		Baik	1	700.000,00
319	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON TYPE :	Pembelian	2015		Baik	1	4.370.000,00
320	Printer (Peralatan Personal Komputer)	L555 / S/N U5WY004969  CANON PIXMA IP2770 / CODE : QC3 - 2772 - DB01 -01	Pembelian	2015		Baik	1	700.000,00
321	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON PIXMA IP2770 / CODE : QC3 - 2772 - DB01 -01	Pembelian	2015		Baik	1	700.000,00
322	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON TYPE :  L555 / S/N U5WY004955	Pembelian	2015		Rusak Serat	1	4.370.000,00
323	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON TYPE : L555 / S/N U5Y004816	Pembelian	2015		Baik	1	4.370.000,00
324	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laser Jet / Type 40	Pembelian	2015		Baik	1	5.050.000,00
325	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L555	Pembelian	2015	S/N U5WY004254	Baik	1	4.650.000,00

	Komputer)							
326	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L555	Pembelian	2015	S/N USWY004639	Baik	1	4.650.000,00
327	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L565	Pembelian	2019		Baik	1	5.300.000,00
328	Printer (Peralatan Personal Komputer)	epson LQ-2190 / dot matrix	Pembelian	2020		Baik	1	7.590.000,00
329	Printer (Peralatan Personal Komputer)	epson/1 6190 / mesin cetak multifungsi berwarna injet	Pembelian	2021		Baik	6	35.640.000,00
330	Printer (Peralatan Personal Komputer)	epson	Pembelian	2022		Baik	1	4.675.000,00
331	Printer (Peralatan Personal Komputer)	epson / L5290	Pembelian	2022		Baik	1	6.987.450,00
332	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Hewlett Packard ( HP ) / Color Laser Jet Pro MFP M182n	Pembelian	2022		Baik	1	14.973.900,00
333	Printer (Peralatan Personal Komputer)	epson	Pembelian	2023		Baik	3	22.803.840,00
334	Printer (Peralatan Personal Komputer)	epson / 16270	Pembelian	2023		Baik	3	21.645.000,00
335	Printer (Peralatan Personal Komputer)	epson	Pembelian	2023		Baik	1	8.602.500,00
336	Printer (Peralatan Personal Komputer)	epson	Pembelian	2023		Baik	1	7.100.670,00
337	Printer (Peralatan Personal Komputer)	epson workforce / wireless A4 duplex	Pembelian	2024		Baik	1	7.300.000,00
338	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	plustek	Pembelian	2022		Baik	1	9.130.000,00
339	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	czur	Pembelian	2023		Baik	1	10.878.000,00
340	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	epson	Pembelian	2023		Baik	1	6.504.600,00
341	External/ Portable Hardisk	adata/durable black / auto backup , kompatibel usb 2.0	Pembelian	2021		Baik	1	2.475.000,00
342	External/ Portable Hardisk	Toshiba	Pembelian	2022		Baik	1	900.000,00
343	External/ Portable Hardisk	SanDisk Ultra 1	Pembelian	2024		Baik	10	17.900.000,00
344	Peralatan Personal Komputer lainnya	Tera byte UPC / UPS  BATTERY	Pembelian	2011		Baik	1	2.000.000,00
345	Peralatan personal komputer lainnya	-	Pembelian	2018		Baik	0	10.004.200,00
346	Peralatan Personal Komputer lainnya	Western Digital	Pembelian	2019		Baik	1	2.100.000,00
347	Peralatan Personal Komputer lainnya	/ Expansion Data Seagate /	Pembelian	2019		Baik	1	1.500.000,00
348	Peralatan Jaringan lainnya	Survelance D-Link / Ultra Wireless HD 4K	Pembelian	2019		Baik	1	5.850.000,00
349	Air Conditioning (AC)	Panasonic	Pembelian	2023		Baik	1	5.217.000,00
350	Bangunan Gedung Kantor permanen	-	Pembelian	2006	187	Baik	1	678.021.323,00
351	Bangunan Gedung kantor permanen	-	Pembelian	2006	108	Kurang Baik	1	103.083.000,00
352	Bangunan Gudang tertutup Semi Permanen	-	Pembelian	2006	60	Kurang Baik	1	32.500.000,00
353	Gedung Pos Jaga Permanen	-	Pembelian	2006	12	Baik	1	16.200.000,00
354	Bangunan Tempat Parkir	-	Pembelian	2024	343.57	Baik	1	229.316.903,55
355	Taman lainnya	-	Pembelian	2012		Baik	1	4.000.000,00
356	Pagar Permanen	-	Pembelian	2023		Baik	1	49.395.000,00
357	Jaringan Distribusi Lain-lain	-	Pembelian	2019	0	Baik	1	3.253.700,00
358	Buku Umum Lain-lain	-	Pembelian	2011		Baik	4	5.000.000,00

2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Saat Ini

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan dalam periode perencanaan

sebelumnya telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, serta pembinaan organisasi kemasyarakatan. Kinerja pelayanan tersebut dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama maupun kinerja program/kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi capaian Tahun Ke-					Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan		60	63	65	68	70	60,46	63,92	65,96			
2.	Presentase Partisipasi Lembaga Politik		67%	80%	100%	67%	67%	67%	80%	100%			
	Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat												
3.	Presetase Konflik Sosial Yang Tertangani		80%	83%	88%	88%	89%	81%	85%	85%			

Dari capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 4 tahun yaitu tahun 2022 sampai dengan 2025 dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja yang tertuang dalam dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan tahun 2025-2029 dapat terlihat bahwa tingkat capaian untuk indikator kinerja utama sebagai berikut:

- 1) Nilai SAKIP yang diperoleh selama tahun 2025-2029 telah mencapai target, adapun nilai yang sudah mencapai target tersebut perlu dilakukan peningkatan pada capaian periode berikutnya untuk mendapatkan kategori BB (sangat baik) sehingga perlu dilakukan tindak lanjut terhadap saran dan rekomendasi yang diberikan oleh tim reviu AKIP untuk meningkatkan nilai AKIP yang diperoleh di periode mendatang;
- 2) Indikator kedua telah memiliki capaian kinerja yang mencapai target kinerja

pada tahun 2024, diharapkan target tersebut dapat dipertahankan pada tahun 2025 dengan melakukan monitoring dan evaluasi kepada partai politik untuk meningkatkan kepatuhan dan partisipasi partai politik penerima bantuan keuangan dalam melaksanakan kewajibannya menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat;

- 3) Indikator ketiga pada tahun 2024 telah mencapai target kinerja yang diharapkan. Langkah yang dilakukan pada periode selanjutnya adalah meningkatkan responsivitas dan efektivitas Badan Kesbangpol dalam menjalankan fungsi pencegahan dan penanganan konflik sosial.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Pelayanan

1. Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan menghadapi sejumlah permasalahan yang dijabarkan sebagai berikut:

Pemetaan Masalah		
Masalah Pokok	Masalah	Penyebab masalah /Akar Masalah
Belum optimalnya kondusivitas daerah	Belum optimalnya pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	Pemahaman wawasan kebangsaan yang belum merata di seluruh lapisan masyarakat
	Masih adanya egosentris kesukuan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial	Adanya keberagaman sebagai dampak dari heterogenitas Kota Balikpapan
	Kebutuhan bahan pokok masih bergantung dengan daerah lain	Kota Balikpapan bukan daerah penghasil bahan pokok makanan
	Pertambahan jumlah penduduk sebagai dampak daya tarik Balikpapan sebagai kota penyangga IKN meningkatkan potensi gangguan trantibum dan potensi munculnya konflik sosial	Kota Balikpapan sebagai Kota penyangga IKN menjadi daya tarik
		Proyek-proyek strategis nasional yang ada Kota Balikpapan
	Rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu dan pilkada
		Rendahnya antusiasme masyarakat terhadap calon yang akan dipilih
		Kurangnya minat perempuan dalam dunia politik

	Belum optimalnya pelaksanaan Pemilu/Pilkada yang berasaskan LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil)	Netralitas ASN
	Belum optimalnya kualitas kehidupan demokrasi	Belum optimalnya peran partai politik dalam menjalankan fungsinya
		Rendahnya partisipasi perempuan dalam legislatif untuk menyuarakan hak perempuan
		Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pendidikan politik

	Belum optimalnya sinergitas antara Organisasi Kemasyarakatan dengan Pemerintah Daerah	Rendahnya pemahaman Organisasi Kemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya
		Belum ada regulasi daerah yang mengatur tentang Organisasi Kemasyarakatan
	Adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada masyarakat	Maraknya aksi premanisme yang dilakukan Organisasi Kemasyarakatan
		Konflik kepengurusan internal organisasi
		Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan
	Belum optimalnya kualitas kehidupan demokrasi	Belum optimalnya peran partai politik dalam menjalankan fungsinya
	Konflik sosial yang ditimbulkan Organisasi Kemasyarakatan	Maraknya aksi premanisme yang dilakukan Organisasi Kemasyarakatan
		Konflik kepengurusan internal organisasi
		Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan



2. Isu Strategis

Berdasarkan evaluasi internal dan eksternal, serta tantangan pembangunan kedepan, isu-isu strategis yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan meliputi:

Isu Strategis Perangkat Daerah						
Potensi yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Sinergitas dengan instansi pendukung keamanan dan kondusivitas wilayah di Kota Balikpapan	Belum optimalnya pemahaman terhadap wawasan kebangsaan di seluruh lapisan masyarakat	Dampak bangkitan pembangunan IKN	Mobilitas masyarakat internasional terkait dengan pembangunan IKN	Pembangunan IKN terhadap kondusivitas wilayah Kalimantan Timur khususnya Kota Balikpapan sebagai Kota Penyangga IKN	Kemunculan perkumpulan atau organisasi masyarakat yang tidak terdaftar ataupun tidak sesuai dengan ideologi bangsa	Penguatan kondusivitas dan stabilitas wilayah
	Pertambahan jumlah penduduk sebagai dampak daya tarik Balikpapan sebagai kota penyangga IKN meningkatkan potensi gangguan transtibum dan potensi munculnya konflik sosial		Tuntutan global terhadap keterbukaan, akuntabilitas, dan perlindungan HAM.	Meningkatnya jumlah ormas yang tidak terdaftar atau menyimpang dari tujuan awal pendiriannya.		
	Rendahnya tingkat partisipasi pemilih					

	dalam pelaksanaan Pemilu/Pilkada					
	Belum optimalnya pelaksanaan Pemilu/Pilkada yang berasaskan LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil)					
	Belum optimalnya kualitas kehidupan demokrasi					
	Belum optimalnya sinergitas antara Organisasi Kemasyarakatan dengan Pemerintah Daerah					
	Potensi timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada masyarakat dari aksi premanisme yang dilakukan organisasi kemasyarakatan					
	Belum optimalnya kualitas kehidupan demokrasi					

	Konflik sosial yang ditimbulkan Organisasi Kemasyarakatan				
--	---	--	--	--	--

## 1. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan menghadapi sejumlah permasalahan sebagai berikut :

### a. Bidang Kesatuan Bangsa

Permasalahan :

- 1) Masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap nilai-nilai dasar Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 2) Belum optimalnya internalisasi nilai wawasan kebangsaan di kalangan pelajar, generasi muda, dan kelompok masyarakat marjinal;
- 3) Kurangnya forum komunikasi kebangsaan lintas etnis, agama, dan golongan yang berkelanjutan;
- 4) Meningkatnya potensi gesekan sosial akibat perbedaan identitas, kepentingan ekonomi, dan politik lokal;
- 5) Masih terdapat konflik sosial yang belum tertangani secara tuntas;
- 6) Lemahnya koordinasi lintas instansi dalam deteksi dini dan cegah dini potensi konflik sosial;
- 7) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang mendukung ketahanan ideologi negara;
- 8) Meningkatnya potensi penyebaran paham intoleransi dan radikalisme berbasis media sosial.

### b. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

- 1) Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi masyarakat dan partai politik;
- 2) Rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan demokrasi non-pemilu;
- 3) Masih terdapat ormas yang belum tertib administrasi dan belum terdaftar secara resmi.

### Isu Strategis

Dari permasalahan di atas baik yang bersifat multisektor maupun sektoral menjadi bahan lebih lanjut dalam perumusan isu strategis melalui pertimbangan urgensi (urgency), kepentingan (seriousness), dan pertumbuhan (growth). Isu strategis dalam isu penyelenggaraan urusan pemerintahan umum adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.**  
**Simpulan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kota Balikpapan**

Isu Strategis Perangkat Daerah						
Potensi yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Sinergitas dengan instansi pendukung keamanan dan kondusivitas wilayah di Kota Balikpapan	Belum optimalnya pemahaman terhadap wawasan kebangsaan di seluruh lapisan masyarakat	Dampak bangkitan pembangunan IKN	Mobilitas masyarakat internasional terkait dengan pembangunan IKN	Pembangunan IKN terhadap kondusivitas wilayah Kalimantan Timur khususnya Kota Balikpapan sebagai Kota Penyangga IKN	Kemunculan perkumpulan atau organisasi masyarakat yang tidak terdaftar ataupun tidak sesuai dengan ideologi bangsa	Penguatan kondusivitas dan stabilitas wilayah
	Pertambahan jumlah penduduk sebagai dampak daya tarik Balikpapan sebagai kota penyangga IKN meningkatkan potensi gangguan transtibum dan potensi munculnya konflik sosial		Tuntutan global terhadap keterbukaan, akuntabilitas, dan perlindungan HAM.	Meningkatnya jumlah ormas yang tidak terdaftar atau menyimpang dari tujuan awal pendiriannya.		
	Rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilu/Pilkada					

	Belum optimalnya pelaksanaan Pemilu/Pilkada yang berasaskan LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil)					
	Belum optimalnya kualitas kehidupan demokrasi					
	Belum optimalnya sinergitas antara Organisasi Kemasyarakatan dengan Pemerintah Daerah					
	Potensi timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada masyarakat dari aksi premanisme yang dilakukan organisasi kemasyarakatan					
	Belum optimalnya kualitas kehidupan demokrasi					
	Konflik sosial yang ditimbulkan Organisasi Kemasyarakatan					

### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan tujuan dan sasaran pada dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 didasarkan pada analisis terhadap isu strategis serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

##### 3.1 Tujuan

Dalam rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan menetapkan satu tujuan utama perangkat daerah, yaitu :

**Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis.**

Tujuan ini menggambarkan kondisi masyarakat Kota Balikpapan yang hidup dalam suasana damai, saling menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Kehidupan yang harmonis merupakan pondasi bagi stabilitas daerah, keamanan, dan kelancaran Pembangunan. Badan Kesbangpol Kota Balikpapan berperan untuk menjaga kondusifitas di Kota Balikpapan.

##### 3.2 Sasaran

Sasaran merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam melayani masyarakat yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program. Sasaran yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelesaian Potensi konflik sosial
2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan beserta indikator kinerjanya dapat disajikan dalam Tabel berikut:

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>											
- Meningkatnya kondusivitas dan perlindungan sosial masyarakat	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis		Angka Potensi Konflik Sosial (per 10.000 Penduduk) (Angka)	0,6	0,57	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	
		Meningkatnya Penyelesaian Potensi konflik sosial	Persentase Potensi Konflik Sosial yang telah Diselesaikan (%)	79	80	80	82	84	86	89	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	60,46	65,96	66,5	67,4	68,3	69,2	70,1	



3.3 Strategi

Strategi Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2025-2029 adalah rencana Tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah/ Upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Penahapan Pembangunan adalah prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Berikut tahapan Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan selama periode 2025-2029:

**Tabel 3.3**  
**Penahapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan**

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Meningkatkan pemberdayaan dan fasilitasi kepada ormas, LSM dan partai politik	Meningkatkan kewaspadaan cegah dini dan deteksi dini terhadap konflik	Mempersiapkan pemilih pemula dalam mengikuti Pemilu/Pilkada	Meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pelaksanaan Pemilu/Pilkada
Meningkatkan kewaspadaan cegah dini dan deteksi dini terhadap konflik	Meningkatkan kewaspadaan cegah dini dan deteksi dini terhadap konflik	Meningkatkan kewaspadaan cegah dini dan deteksi dini terhadap konflik	Meningkatkan kewaspadaan cegah dini dan deteksi dini terhadap konflik	Meningkatkan kewaspadaan cegah dini dan deteksi dini terhadap konflik

3.4 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Arah kebijakan yang dirumuskan dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang lebih operasional. Adapun arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan selama periode 2025-2029 sebagai berikut:

Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
Peningkatan ekosistem ekonomi kreatif dan inovatif yang berkelanjutan	Penguatan pengawasan terhadap parpol, LSM, dan Ormas Pembinaan kepada organisasi	

	kemasyarakatan Pembinaan ideologi pancasila	
	Pembinaan wawasan kebangsaan kepada ormas-ormas kedaerah dan masyarakat secara keseluruhan untuk membangun kesadaran wawasan kebangsaan dan Bhineka Tunggal Ika	

BAB IV  
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG  
URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan selama periode renstra di atas. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2025-2030, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Balikpapan.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Balikpapan;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan.
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan.

Berikut adalah Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang direncanakan sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan:

**I. 8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

1. 8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1) 8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - 2) 8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
2. 8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1) 8.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
  - 2) 8.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
3. 8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1) 8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - 2) 8.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - 3) 8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - 4) 8.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - 5) 8.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu;
  - 6) 8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
4. 8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) 8.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 2) 8.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 3) 8.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel;
- 4) 8.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
5. 8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) 8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - 2) 8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. 8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) 8.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - 2) 8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - 3) 8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - 4) 8.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
  - 5) 8.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
  - 6) 8.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

## **II. 8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**

1. 8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
  - 1) 8.01.02.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
  - 2) 8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
  - 3) 8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
  - 4) 8.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
  - 5) 8.01.02.2.01.0006 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
  - 6) 8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka;
  - 7) 8.01.02.2.01.0009 - Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila.

## **III. 8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**

1. 8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
  - 1) 8.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
  - 2) 8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
  - 3) 8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
  - 4) 8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

**IV. 8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

1. 8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
  - 1) 8.01.04.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
  - 2) 8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
  - 3) 8.01.04.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
  - 4) 8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

**V. 8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**

1. 8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
  - 1) 8.01.05.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan

Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;

- 2) 8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
- 3) 8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
- 4) 8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

#### **VI. 8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**

1. 8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
  - 1) 8.01.06.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
  - 2) 8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
  - 3) 8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
  - 4) 8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
  - 5) 8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

#### **4.2 Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Subkegiatan**

Pagu Indikatif merupakan batas maksimal anggaran yang dialokasikan untuk setiap program, kegiatan, hingga sub-kegiatan. Pagu Indikatif ini berfungsi sebagai batas estimasi anggaran yang akan menjadi acuan penting bagi kita semua dalam merancang program, kegiatan, dan sub-kegiatan, agar dapat berjalan optimal dan mencapai sasaran yang diharapkan. Adapun Rumusan rencana program, kegiatan dan subkegiatan beserta Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan selama periode Tahun 2025-2029 sebagai berikut ini.

**RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN**  
**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN**  
**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				37.335.59 9.000		38.455.66 7.000		40.378.45 0.000		41.186.01 9.000		42.421.60 0.000		
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A				10.296.15 9.091		11.419.67 3.815		11.953.45 6.815		12.347.02 5.815		12.526.87 7.710		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	80,2	80,5	10.296.15 9.091	81	11.419.67 3.815	81,25	11.953.45 6.815	81,5	12.347.02 5.815	82	12.526.87 7.710	8.01.0.00.0.00.0 1.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				46.014.70 0		45.674.70 0		48.040.00 0		48.040.00 0		60.000.00 0		
Tersedianya indikator kinerja yang relevan, terukur, dan selaras dari tingkat individu hingga organisasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	46.014.70 0	1	45.674.70 0	1	48.040.00 0	1	48.040.00 0	1	60.000.00 0		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.634.700		7.634.700		10.000.00 0		10.000.00 0		10.000.00 0		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	7.634.700	1	7.634.700	1	10.000.00 0	1	10.000.00 0	1	10.000.00 0		
8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan				38.380.00 0		38.040.00 0		38.040.00 0		38.040.00 0		50.000.00 0		



Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	4	38.380.000	4	38.040.000	4	38.040.000	4	38.040.000	4	50.000.000		
8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.482.849.000		6.380.000.000		6.677.754.935		6.897.932.145		7.018.815.830		
Laporan realisasi anggaran perangkat daerah secara berkala dan akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21	25	5.482.849.000	26	6.380.000.000	28	6.677.754.935	28	6.897.932.145	28	7.018.815.830		
8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.482.849.000		6.380.000.000		6.677.754.935		6.897.932.145		7.018.815.830		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21	25	5.482.849.000	26	6.380.000.000	28	6.677.754.935	28	6.897.932.145	28	7.018.815.830		
8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				350.000.000		406.000.000		432.000.000		470.000.000		485.000.000		

Data dan dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tertib dan akuntabel	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	0	350.000.000	2	406.000.000	2	432.000.000	2	470.000.000	2	485.000.000		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20	25		25		26		26		26			
8.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		56.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	0	0	2	56.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000		
8.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				350.000.000		350.000.000		362.000.000		400.000.000		415.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20	25	350.000.000	25	350.000.000	26	362.000.000	26	400.000.000	26	415.000.000		

8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.212.633. 766		1.245.906. 405		1.373.906. 405		1.433.906. 405		1.504.906. 405		
Laporan pelaksanaan admistrasi umum dan pengelolaan sarana perkantoran secara aktif dan efisien	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1.212.633. 766	1	1.245.906. 405	1	1.373.906. 405	1	1.433.906. 405	1	1.504.906. 405		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	14	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	11	9		8		8		8		8			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	32	30		33		35		37		40			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	3		5		7		6		6			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	36	24		24		24		24		24			

8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				249.823.3 50		260.000.0 00		350.000.0 00		350.000.0 00		350.000.0 00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	3	249.823.3 50	5	260.000.0 00	7	350.000.0 00	6	350.000.0 00	6	350.000.0 00		
8.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				440.367.9 05		450.367.9 05		470.367.9 05		484.367.9 05		507.367.9 05		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	11	9	440.367.9 05	8	450.367.9 05	8	470.367.9 05	8	484.367.9 05	8	507.367.9 05		
8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				59.909.96 1		60.000.00 0		65.000.00 0		65.000.00 0		65.000.00 0		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	59.909.96 1	1	60.000.00 0	1	65.000.00 0	1	65.000.00 0	1	65.000.00 0		
8.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				12.538.50 0		15.538.50 0		18.538.50 0		19.538.50 0		22.538.50 0		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang	36	24	12.538.50 0	24	15.538.50 0	24	18.538.50 0	24	19.538.50 0	24	22.538.50 0		

	Disediakan (Dokumen)													
8.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				49.994.05 0		50.000.00 0		50.000.00 0		55.000.00 0		60.000.00 0		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	14	10	49.994.05 0	10	50.000.00 0	10	50.000.00 0	10	55.000.00 0	10	60.000.00 0		
8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400.000.0 00		410.000.0 00		420.000.0 00		460.000.0 00		500.000.0 00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	32	30	400.000.0 00	33	410.000.0 00	35	420.000.0 00	37	460.000.0 00	40	500.000.0 00		
8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				821.735.8 20		651.735.8 20		467.600.0 00		605.600.0 00		515.000.0 00		
Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	5	821.735.8 20	4	651.735.8 20	2	467.600.0 00	2	605.600.0 00	3	515.000.0 00		
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		1		0			

	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	0		2		0		2		2			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
8.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				237.600.000		247.600.000		267.600.000		280.600.000		290.000.000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	1	237.600.000	1	247.600.000	1	267.600.000	1	280.600.000	1	290.000.000		
8.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		60.000.000		0		75.000.000		75.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	0	0	2	60.000.000	0	0	2	75.000.000	2	75.000.000		
8.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				344.135.820		344.135.820		200.000.000		150.000.000		150.000.000		

Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	5	344.135.8 20	4	344.135.8 20	2	200.000.0 00	2	150.000.0 00	3	150.000.0 00		
8.01.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		100.000.0 00		0		
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000.0 00	0	0		
8.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				240.000.0 00		0		0		0		0		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	240.000.0 00	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.318.219. 055		1.332.000. 000		1.361.219. 055		1.423.219. 055		1.446.219. 055		
Laporan pelaksanaan dan pertanggungjawab an penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	5	1.318.219. 055	5	1.332.000. 000	5	1.361.219. 055	5	1.423.219. 055	5	1.446.219. 055		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36		36		36		36		36			

8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				290.385.8 55		300.000.0 00		300.385.8 55		350.385.8 55		355.385.8 55		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	290.385.8 55	36	300.000.0 00	36	300.385.8 55	36	350.385.8 55	36	355.385.8 55		
8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.027.833. 200		1.032.000. 000		1.060.833. 200		1.072.833. 200		1.090.833. 200		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	5	1.027.833. 200	5	1.032.000. 000	5	1.060.833. 200	5	1.072.833. 200	5	1.090.833. 200		
8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.064.706. 750		1.358.356. 890		1.592.936. 420		1.468.328. 210		1.496.936. 420		
Barang milik daerah dalam kondisi baik dan fungsional melalui kegiatan pemeliharaan rutin berkala	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0	1.064.706. 750	0	1.358.356. 890	2	1.592.936. 420	2	1.468.328. 210	2	1.496.936. 420		
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	0		0		1		0		0			



	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	19	21		21		21		21		21			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	61	125		125		128		128		128			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
8.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				565.888.680		578.888.680		575.888.680		587.860.000		591.888.680		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	19	21	565.888.680	21	578.888.680	21	575.888.680	21	587.860.000	21	591.888.680		

	dibayarkan Pajaknya (Unit)													
8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		10.000.00 0		15.000.00 0		15.000.00 0		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0	0	0	0	2	10.000.00 0	2	15.000.00 0	2	15.000.00 0		
8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				365.238.5 40		375.888.6 80		395.888.6 80		394.888.6 80		398.888.6 80		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	61	125	365.238.5 40	125	375.888.6 80	128	395.888.6 80	128	394.888.6 80	128	398.888.6 80		
8.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0		60.000.00 0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	0	0	0	0	1	60.000.00 0	0	0	0	0		

8.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		200.000.0 00		250.579.5 30		220.579.5 30		240.579.5 30		
Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (Unit)	1	0	0	1	200.000.0 00	1	250.579.5 30	1	220.579.5 30	1	240.579.5 30		
8.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				133.579.5 30		203.579.5 30		300.579.5 30		250.000.0 00		250.579.5 30		
Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (Unit)	1	1	133.579.5 30	1	203.579.5 30	1	300.579.5 30	1	250.000.0 00	1	250.579.5 30		
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				8.063.048. 810		7.868.733. 136		8.058.733. 136		8.118.733. 136		8.189.733. 136		
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase masyarakat yang memperoleh penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan (%)	64	75	8.063.048. 810	79	7.868.733. 136	80	8.058.733. 136	85	8.118.733. 136	90	8.189.733. 136	8.01.0.00.0.00.0 1.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				8.063.048. 810		7.868.733. 136		8.058.733. 136		8.118.733. 136		8.189.733. 136		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan terhadap masyarakat	Jumlah Paskibraka (Orang)	43	43	8.063.048. 810	43	7.868.733. 136	43	8.058.733. 136	43	8.118.733. 136	43	8.189.733. 136		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	300	300		350		350		350		350			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal	4	0		0		1		1		1			

	Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)												
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	0	2.050		1.000		1.050		1.100		1.150		
	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang	2	1		1		1		1		1		

	Disusun (Dokumen)												
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	40	43		43		43		43		43		
	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
8.01.02.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal				949.991.6 30		755.000.0 00		765.000.0 00		770.000.0 00		770.000.0 00	

Ika dan Sejarah Kebangsaan														
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	2	1	949.991.6 30	1	755.000.0 00	1	765.000.0 00	1	770.000.0 00	1	770.000.0 00		
8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1.000.000. 000		1.000.000. 000		1.040.000. 000		1.050.000. 000		1.055.000. 000		

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	40	43	1.000.000.000	43	1.000.000.000	43	1.040.000.000	43	1.050.000.000	43	1.055.000.000		
8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				500.000.000		500.000.000		500.000.000		515.000.000		535.000.000		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	300	300	500.000.000	350	500.000.000	350	500.000.000	350	515.000.000	350	535.000.000		



8.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0		0		70.000.00 0		80.000.00 0		90.000.00 0		
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	4	0	0	0	0	1	70.000.00 0	1	80.000.00 0	1	90.000.00 0		
8.01.02.2.01.0006 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek				1.500.000. 000		1.500.000. 000		1.520.000. 000		1.520.000. 000		1.530.000. 000		

Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	0	2.050	1.500.000.000	1.000	1.500.000.000	1.050	1.520.000.000	1.100	1.520.000.000	1.150	1.530.000.000		
8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka				3.603.057.180		3.603.733.136		3.633.733.136		3.653.733.136		3.659.733.136		
Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)	43	43	3.603.057.180	43	3.603.733.136	43	3.633.733.136	43	3.653.733.136	43	3.659.733.136		
8.01.02.2.01.0009 - Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				510.000.000		510.000.000		530.000.000		530.000.000		550.000.000		

Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	0	1	510.000.000	1	510.000.000	1	530.000.000	1	530.000.000	1	550.000.000		
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				6.846.698.920		9.131.567.870		9.431.567.870		9.586.567.870		10.001.567.870		
Meningkatnya peran Partai Politik dalam peningkatan kehidupan demokrasi	Persentase Partai Politik yang aktif melaksanakan Pendidikan Politik kepada masyarakat (%)	100	100	6.846.698.920	100	9.131.567.870	100	9.431.567.870	100	9.586.567.870	100	10.001.567.870	8.01.0.00.0.00.0 1.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala				6.846.698.920		9.131.567.870		9.431.567.870		9.586.567.870		10.001.567.870		

Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik														
Terlaksananya etika dan budaya politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	1	1	6.846.698.920	1	9.131.567.870	1	9.431.567.870	1	9.586.567.870	1	10.001.567.870		

	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	100	150		150		170		200		220			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	100	100		150		200		300		350			

	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
8.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				4.211.194. 420		6.485.063. 370		6.535.063. 370		6.540.063. 370		6.590.063. 370		

Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	2	1	4.211.194.420	1	6.485.063.370	1	6.535.063.370	1	6.540.063.370	1	6.590.063.370		
8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				717.566.000		728.566.000		828.566.000		928.566.000		978.566.000		

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	100	100	717.566.000	150	728.566.000	200	828.566.000	300	928.566.000	350	978.566.000		
8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				268.500.000		268.500.000		318.500.000		323.500.000		523.500.000		



Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	100	150	268.500.000	150	268.500.000	170	318.500.000	200	323.500.000	220	523.500.000		
8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1.649.438.500		1.649.438.500		1.749.438.500		1.794.438.500		1.909.438.500		

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	1	1	1.649.438.500	1	1.649.438.500	1	1.749.438.500	1	1.794.438.500	1	1.909.438.500		
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				2.306.355.115		2.306.355.115		2.496.355.115		2.529.355.115		2.672.084.220		
Meningkatnya keaktifan Organisasi Kemasyarakatan dalam pembangunan daerah	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah (%)	39	60	2.306.355.115	65	2.306.355.115	70	2.496.355.115	75	2.529.355.115	80	2.672.084.220	8.01.0.00.0.00.0 1.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				2.306.355. 115		2.306.355. 115		2.496.355. 115		2.529.355. 115		2.672.084. 220		
Terlaksananya ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	100	150	2.306.355. 115	150	2.306.355. 115	200	2.496.355. 115	220	2.529.355. 115	220	2.672.084. 220		
	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	0	300		350		375		400		425			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
8.01.04.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan				338.711.1 65		338.711.1 65		338.711.1 65		343.711.1 65		386.440.2 70		

Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	338.711.165	1	338.711.165	1	338.711.165	1	343.711.165	1	386.440.270		
8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1.163.775.000		1.163.775.000		1.213.775.000		1.218.775.000		1.238.775.000		

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	0	300	1.163.775.000	350	1.163.775.000	375	1.213.775.000	400	1.218.775.000	425	1.238.775.000		
8.01.04.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				290.200.000		290.200.000		330.200.000		348.200.000		348.200.000		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	100	150	290.200.000	150	290.200.000	200	330.200.000	220	348.200.000	220	348.200.000		

8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				513.668.9 50		513.668.9 50		613.668.9 50		618.668.9 50		698.668.9 50		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	1	1	513.668.9 50	1	513.668.9 50	1	613.668.9 50	1	618.668.9 50	1	698.668.9 50		
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				2.408.759. 100		1.710.759. 100		1.860.759. 100		1.935.759. 100		2.035.759. 100		

Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	100	100	2.408.759. 100	100	1.710.759. 100	100	1.860.759. 100	100	1.935.759. 100	100	2.035.759. 100	8.01.0.00.0.00.0 1.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				2.408.759. 100		1.710.759. 100		1.860.759. 100		1.935.759. 100		2.035.759. 100		
Terlaksananya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	48	48	2.408.759. 100	12	1.710.759. 100	12	1.860.759. 100	12	1.935.759. 100	12	2.035.759. 100		



	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	400	400		400		450		450		450			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	250	300		300		310		310		320			

	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
8.01.05.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1.245.059. 100		545.059.1 00		545.059.1 00		550.059.1 00		550.059.1 00		

Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	1.245.059.100	1	545.059.100	1	545.059.100	1	550.059.100	1	550.059.100		
8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				500.000.000		500.000.000		650.000.000		655.000.000		655.000.000		

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	400	400	500.000.000	400	500.000.000	450	650.000.000	450	655.000.000	450	655.000.000		
8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				263.700.000		265.700.000		265.700.000		325.700.000		325.700.000		

Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	250	300	263.700.000	300	265.700.000	310	265.700.000	310	325.700.000	320	325.700.000		
8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				400.000.000		400.000.000		400.000.000		405.000.000		505.000.000		

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	48	48	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	405.000.000	12	505.000.000		
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				7.414.577.964		6.018.577.964		6.577.577.964		6.668.577.964		6.995.577.964		
Meningkatnya kualitas penanganan potensi konflik sosial	Persentase Potensi Konflik Sosial yang Ditangani (%)	100	100	7.414.577.964	100	6.018.577.964	100	6.577.577.964	100	6.668.577.964	100	6.995.577.964	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				7.414.577.964		6.018.577.964		6.577.577.964		6.668.577.964		6.995.577.964		

Terlaksanannya Penanganan Konflik sosial Yang Diselesaikan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	40	40	7.414.577. 964	40	6.018.577. 964	40	6.577.577. 964	40	6.668.577. 964	40	6.995.577. 964		
	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	1		1		1		1		1			

	yang Disusun (Dokumen)												
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	24	36		36		36		36		36		
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	36	36		36		36		36		36		



	Konflik di Daerah (Laporan)													
	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	40	40		40		40		40		40			

8.01.06.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				3.782.499. 995		2.382.499. 995		2.382.499. 995		2.387.499. 995		2.387.499. 995		
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	3.782.499. 995	1	2.382.499. 995	1	2.382.499. 995	1	2.387.499. 995	1	2.387.499. 995		

8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1.183.085. 809		1.185.085. 809		1.194.085. 809		1.200.085. 809		1.262.085. 809		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	40	40	1.183.085. 809	40	1.185.085. 809	40	1.194.085. 809	40	1.200.085. 809	40	1.262.085. 809		

8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				349.499.9 10		351.499.9 10		501.499.9 10		506.499.9 10		546.499.9 10		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	40	40	349.499.9 10	40	351.499.9 10	40	501.499.9 10	40	506.499.9 10	40	546.499.9 10		

8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				349.492.2 50		349.492.2 50		349.492.2 50		424.492.2 50		449.492.2 50		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	36	36	349.492.2 50	36	349.492.2 50	36	349.492.2 50	36	424.492.2 50	36	449.492.2 50		

	Konflik di Daerah (Laporan)													
8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1.750.000. 000		1.750.000. 000		2.150.000. 000		2.150.000. 000		2.350.000. 000		
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	24	36	1.750.000. 000	36	1.750.000. 000	36	2.150.000. 000	36	2.150.000. 000	36	2.350.000. 000		

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM  
PRIORITAS  
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA  
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				
1.	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	

			Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.0006 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
			8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka	
2.	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya peran Partai Politik dalam peningkatan kehidupan demokrasi	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
			8.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	



			Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

			8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
3.	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya keaktifan Organisasi Kemasyarakatan dalam pembangunan daerah	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			8.01.04.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			8.01.04.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	

			Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
4.	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
			8.01.05.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

			8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
5.	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya kualitas penanganan potensi konflik sosial	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
			8.01.06.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	

--	--	--

Penanganan Konflik di Daerah	
8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

			8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
--	--	--	--	--

4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

IKU ditetapkan sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk satu periode kedepan. Berikut ini disajikan tabel IKU dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan.

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD**  
**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**

N O	INDIKAT OR	SATU AN	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERAN GAN
				202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	203 0	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.	Angka Potensi Konflik Sosial (per 10.000 Penduduk)	Angka	0,6	0,57	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	Indikator Tujuan PD
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	60,46	65,96	66,5	67,4	68,3	69,2	70,1	Indikator Sasaran PD
4.	Persentase Potensi Konflik	%	79	80	80	82	84	86	89	Indikator Sasaran PD

	Sosial yang telah Diselesaikan									
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan atau kebijakan publik. IKK membantu dalam:

- 1) **Mengukur capaian program dan kegiatan:** Seberapa jauh program-program yang telah direncanakan (misalnya pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, atau pendidikan) berhasil dilaksanakan dan mencapai targetnya.
- 2) **Mengevaluasi kinerja birokrasi:** Seberapa efisien dan efektif aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- 3) **Mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti:** Data dari IKK menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih tepat dan terarah, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan.
- 4) **Meningkatkan akuntabilitas publik:** Dengan adanya IKK, masyarakat dapat melihat dan menilai sendiri kinerja pemerintah, sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas.

IKK dengan IKU merupakan hal yang berbeda. IKU cenderung fokus pada hasil akhir (*outcome*) dan dampak (*impact*) yang lebih luas, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau tingkat kemiskinan. Sementara itu, IKK lebih fokus pada proses, *output*, dan efisiensi kegiatan yang mendukung pencapaian IKU tersebut.

Berikut ini disajikan tabel IKK dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan.

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA  
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
2.	Angka Potensi Konflik Sosial (per 10.000 Penduduk)	negatif	Angka	0,6	0,57	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	Indikator Tujuan PD
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	positif	Nilai	60,46	65,96	66,5	67,4	68,3	69,2	70,1	Indikator Sasaran PD
4.	Persentase Potensi Konflik Sosial yang telah Diselesaikan	positif	%	79	80	80	82	84	86	89	Indikator Sasaran PD

[illegible]



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Catatan Penting

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah. Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah.

Renstra ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Oleh karena itu, pelaksanaan Renstra memerlukan komitmen seluruh jajaran aparatur serta dukungan dari para pemangku kepentingan terkait untuk mewujudkan masyarakat Kota Balikpapan yang harmonis, toleran, dan berdaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain sebagai acuan perencanaan, dokumen ini juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah agar pencapaian tujuan dan sasaran dapat terukur, efektif, dan akuntabel.

#### 5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Konsistensi perencanaan dan penganggaran. Setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra harus menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahun anggaran;
2. Sinkronisasi dan integrasi kebijakan. Pelaksanaan program dan kegiatan harus selaras dengan arah kebijakan nasional dan provinsi, serta mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan;
3. Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana harus digunakan secara optimal untuk mendukung hasil yang nyata dan berkelanjutan;
4. Partisipasi masyarakat dan kolaborasi lintas sektor. Pelaksanaan Renstra perlu melibatkan partisipasi aktif masyarakat, organisasi kemasyarakatan, partai politik, lembaga keagamaan, akademisi, dan dunia usaha dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan kerukunan sosial;
5. Transparansi dan akuntabilitas kinerja. Pelaporan pelaksanaan Renstra dilakukan secara berkala melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta dievaluasi untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan.

### 5.3 Rencana Tindak Lanjut

Untuk memastikan implementasi Renstra berjalan sesuai arah yang ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan akan melaksanakan langkah- langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang memuat prioritas kegiatan dan target kinerja sesuai tahapan pencapaian sasaran strategis;
2. Penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) secara terukur dan realistis untuk memantau perkembangan capaian hasil; Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya, termasuk kebutuhan anggaran, peningkatan kapasitas SDM, dan pengembangan sistem informasi kinerja;
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala, baik internal maupun lintas perangkat daerah, guna memastikan sinkronisasi capaian antar program;
4. Penyempurnaan dan revisi Renstra apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, daerah, atau dinamika sosial politik yang signifikan.

Dengan tersusunnya dokumen Renstra ini, diharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan memiliki arah yang jelas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang rukun, demokratis, dan berdaya saing dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## AC. KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan Kota Balikpapan memasuki tahap pertama di dalam rangkaian pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045. Tahap pertama ini merupakan tahapan krusial karena menentukan agenda transformasi pembangunan untuk 5 tahun mendatang. Visi pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan, yaitu **“Balikpapan Nyaman untuk Semua 2045: Superhub Industri dan Jasa yang Maju dan Berkelanjutan dengan Semangat Madinatul Iman”**. Visi tersebut salah satunya diwujudkan melalui agenda pembangunan tahap pertama yang memiliki tema berupa “Penguatan Fondasi Transformasi: Balikpapan Kota Cerdas dan Kolaboratif.

Dalam rangka menyongsong periode pembangunan lima tahun mendatang, maka Kecamatan Balikpapan Tengah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Rencana Strategis (Renstra) merupakan perencanaan yang bersifat jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan. Rencana Strategis (Renstra) juga memuat kerangka pendanaan pembangunan daerah yang bersifat indikatif dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) dengan mempedomani RPJMD dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), serta memperhatikan tugas dan fungsi dari perangkat daerah.

Sebagai unit kerja perangkat daerah yang menjalankan sebagian kewenangan Wali Kota di tingkat wilayah, Kecamatan Balikpapan Tengah memiliki posisi strategis dalam memastikan sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dengan dinamika kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan. Oleh karena itu, penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2026–2030 dilakukan secara sistematis dan partisipatif, dengan mempertimbangkan kondisi aktual wilayah, potensi lokal, isu-isu strategis, serta hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya.

Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) kecamatan serta menjadi instrumen pengukuran kinerja aparatur kecamatan dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan di wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan seluruh jajaran Kecamatan Balikpapan Tengah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih terarah, terukur, dan akuntabel guna mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Balikpapan secara keseluruhan.

**Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)**



Rancangan Rencana Strategis (Renstra) nantinya disusun dengan memerhatikan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah yang akan direspon melalui rumusan strategi, arah kebijakan dan program prioritas Perangkat Daerah. Nantinya, substansi dari ketetapan-ketetapan yang telah termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) akan menjadi acuan dasar bagi Kecamatan Balikpapan Tengah dalam merumuskan kebijakan perencanaan strategis instansi daerah melalui rencana strategis perangkat daerah. Oleh karenanya, Rencana Strategis (Renstra) memiliki peran yang penting dalam proses perencanaan pembangunan perangkat daerah secara umum.

## 1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tahun 2025-2029 memiliki dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73),
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

- Nomor 1419);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  23. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 20);
  24. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 54);
  25. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2045.
  26. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2025- 2029, yaitu untuk memberikan arahan perencanaan dan pelaksanaan strategi pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Balikpapan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Tersedianya dokumen yang memuat gambaran kinerja pembangunan dan kondisi keuangan daerah yang aktual; l;
2. Tersedianya dokumen yang memuat pemetaan masalah berbasis capaian kinerja dan rumusan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah;
3. Sebagai dasar perumusan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan selama lima tahun kedepan;
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);
5. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergi dan terpadu antara perencanaan pembangunan kota Balikpapan, serta perencanaan sektoral;
6. Sebagai tolok ukur untuk penilaian keberhasilan Kecamatan Balikpapan Tengah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel;
7. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

**BAB I      PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas tentang isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

**BAB II      GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH**

Menjelaskan gambaran umum tentang peran (tugas dan fungsi) sebagai perngakt daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahanan daerah daam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

**BAB III      PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH**

Menjelaskan gambaran tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah, telaahan visi, misi dan program Wali Kota terpilih, telaahan RPJMD Kota Balikpapan, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

**BAB IV      TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Balikpapan Tengah.

**BAB V      STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH**

Memuat tentang strategi dan kebijakan pelaksanaan kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah.

**BAB VI      RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH**

Memuat tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan pelaksanaan kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah selama 5 (lima) Tahun.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH**

Menyajikan indikator kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Balikpapan.

## **BAB VIII PENUTUP**

Memuat tentang kesimpulan Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2025-2029.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sub bab ini menguraikan gambaran umum terkait tugas, fungsi Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan dijelaskan secara rinci dijabarkan sebagai berikut.

##### **2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Kecamatan Balikpapan Tengah merupakan salah satu perangkat daerah di kota Balikpapan yang mempunyai wilayah kerja di kecamatan Sebagai unsur Perangkat daerah ah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Kecamatan Balikpapan Tengah dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Balikpapan Tengah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Tugas dan fungsi Kecamatan Kecamatan Balikpapan Tengah mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.

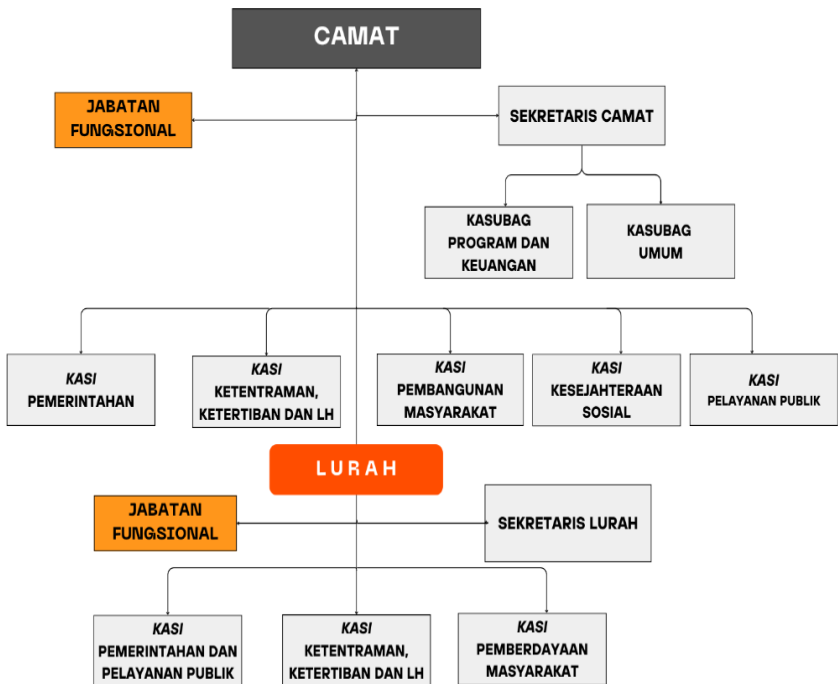
Camat menyelenggarakan tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
6. Pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah kecamatan;
10. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dibidang administrasi Pertanahan dan kependudukan di wilayah kecamatan;
11. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
12. Pelaksanaan Monitoring evaluasi pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan atau atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kecamatan Balikpapan Tengah berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun

2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan



Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota, **Camat** menangani sebagian urusan otonomi daerah, Camat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjasi ruang lingkup tugasnya;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
10. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahandan kependudukan di wilayah Kecamatan;
11. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

13. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.yah Kecamatan;

Dalam melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian. Camat dibantu oleh **Sekretaris** membawahi Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan serta Kasubag Umum. Sekretraris melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Pengoordinasian penyusunan usulan program dan kegiatan;
2. Pengoordinasian penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah;
3. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
4. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
5. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
6. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
7. Pengelolaan anggaran Kecamatan dan penerimaan administrasi;
8. Pelaksanaan administrasi keuangan;
9. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dan;
11. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok menyusun perencanaan program dan pengelolaan administrasi keuangan, **Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan** bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas dan fungsisebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah meliputi:
  - a. Rencana Strategis;
  - b. Rencana Kerja;
  - c. Rencana Kerja Tahunan;
  - d. Penetapan Kinerja; dan
  - e. Laporan Kinerja.
2. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
3. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
4. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
5. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan.
6. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
7. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
8. Melaksanakan sistem akutansi pengelolaan keuangan;
9. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
10. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
11. Mengoordinir dan meneliti anggaran;

12. Menyusun laporan keuangan Kecamatan;
13. Melaksanakan monitoring evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas **Kasubag Umum** bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
2. Mengelola tertib administrasi umum dan ketatausahaan;
3. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
4. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
5. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
6. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
7. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventaris barang;
8. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
9. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
10. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
11. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
12. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
13. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
14. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan;
15. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan **Kasi Pemerintahan** yang bertanggung jawab kepada Camat untuk :

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan;
2. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah Kecamatan;
3. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kependudukan di wilayah kecamatan
4. Memfasilitasi permasalahan pertanahan di wilayah Kecamatan;
5. Melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan;
6. Memfasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan;
7. Melaksanakan Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan
8. Menyusun dokumen monografi di kecamatan;

9. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan
11. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketentraman, ketertiban dan Lingkungan Hidup, **Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup** bertanggung jawab kepada Camat untuk:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban, dan lingkungan hidup;
2. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketentraman, ketertiban dan kemasyarakatan;
3. Melaksanakan pengawasan rumah sewa/pondokan;
4. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan rumah sewa/pondokan;
5. Melaksanakan pengoordinasian pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin;
6. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan, lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan;
8. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
9. Memfasilitasi permasalahan ketentraman, ketertiban, dan lingkungan hidup;
10. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketentraman dan ketertiban wilayah serta antisipasi bencana alam;
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Pembangunan, **Kasi Pembangunan** bertanggung jawab kepada Camat untuk:

1. Menyusun program dan kegiatan di bidang pembangunan masyarakat;
2. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan;
3. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan;

4. Memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian;
5. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
6. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
7. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah;
8. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong-royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
9. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program pembangunan kelurahan dan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
10. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Dalam melaksanakan tugas **Kasi Kesejahteraan Sosial** bertanggung jawab kepada Camat untuk:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial;
2. Memfasilitasi penanggulangan bencana, pasca bencana dan pengungsi serta masalah sosial
3. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
4. Melaksanakan fasilitas pembinaan dan pengawasan kegiatan program, kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga bencana;
5. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama;
6. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
7. Melaksanakan fasilitas pembinaan program usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan.
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas **Kasi Pelayanan Publik** bertanggung jawab kepada Camat untuk:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pelayanan publik;
2. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
3. Menyusun Standar Operasional Prosedur;
4. Menyusun Standar Pelayanan
5. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;

6. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
7. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
8. Mengelola layanan pengaduan terhadap pelayanan yang di erikan;
9. Memfasilitasi dan menindak lanjuti hasil pengaduan dan pemberian informasi;
10. Mengelola layanan pengaduan terhadap pelayanan yang di berikan;
11. Memfasilitasi dan menindak lanjuti hasil pengaduan warga terhadap pelayanan;
12. Melaksanakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat
13. Melaksanakan tatakelola pelayanan publik
14. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi terkait pembverian pelayanan terhadap warga;
15. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertahanan, kependudukan, pembangunan, ketentraman, ketertiban, lingkungan hidup, dan kesejahteraan sosial yang di koordinasikan dengan seksi terkait;
16. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pada kelurahan;
17. Melaksanakan pengamanan *hardwer* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
18. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
19. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
20. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugas nya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan, maka Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kelurahan. Kelurahan berkedudukan dibawah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

**Lurah** adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaran pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Adapun tugas seorang Lurah yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
3. Penyelenggaraan dan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Penyelenggaraan administrasi kependudukan;

6. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
7. Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan Pembangunan dan kemasyarakatan;
8. Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Sekretariat** Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
  - a. Rencana strategis;
  - b. Rencana kerja;
  - c. Rencana kerja tahunan;
  - d. Penetapan kinerja; dan
  - e. Laporan kinerja;
2. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
3. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan Kegiatan;
4. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
5. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
7. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
8. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
9. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
10. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
11. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
12. Menyusun laporan keuangan kelurahan;
13. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
14. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
15. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
16. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
17. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
18. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
19. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik daerah;
20. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
21. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
22. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;



23. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
24. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
25. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
26. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
27. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan publik
2. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
4. Melaksanakan administrasi pertahanan
5. Melaksanakan tertib administrasi dan penandatanganan kependudukan;
6. Melaksanakan pembinaan rukun tetangga
7. Menyusun monografi kelurahan;
8. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
9. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
10. Menyusun standar operasional dan prosedur pelayanan dan menyusun standar pelayanan lingkup Kelurahan;
11. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan
12. Menyusun tatalaksana dan tatakelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi pelayanan publik;
13. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
14. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan;
15. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
16. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketentraman dan ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
17. Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
18. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
19. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan;
20. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup** yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
2. Melaksanakan layanan bidang ketentraman dan ketertiban serta layanan surat pengantar izin pertunjukan dan keramaian;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
4. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan;
5. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;
6. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
7. Memfasilitasi permasalahan di bidang ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
8. Melaksanakan koordinasi ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup dengan instansi terkait, lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan rukun tetangga;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan;
10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Pemberdayaan Masyarakat** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
2. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan;
3. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadaya masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
5. Melaksanakan pembinaan penataan penataan pembangunan permukiman penduduk;
6. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kelurahan;
7. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
8. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama;
9. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
10. Melaksanakan fasilitasi pendataan masyarakat rentan masalah sosial dan keluarga miskin;
11. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial;
12. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah dibidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
13. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kegiatan/program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
14. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha kesejahteraan rakyat;

15. Melaksanakan fasilitasi penanggulangan korban bencana;
16. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
17. Melaksanakan penyusunan profil kelurahan;
18. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
19. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai bidang tugasnya.

**Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kelurahan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggungjawab kepada Lurah dan secara operasional dikoordinasikan dan bertanggung jawab kepada kepala seksi sesuai pembidangnya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta uraian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

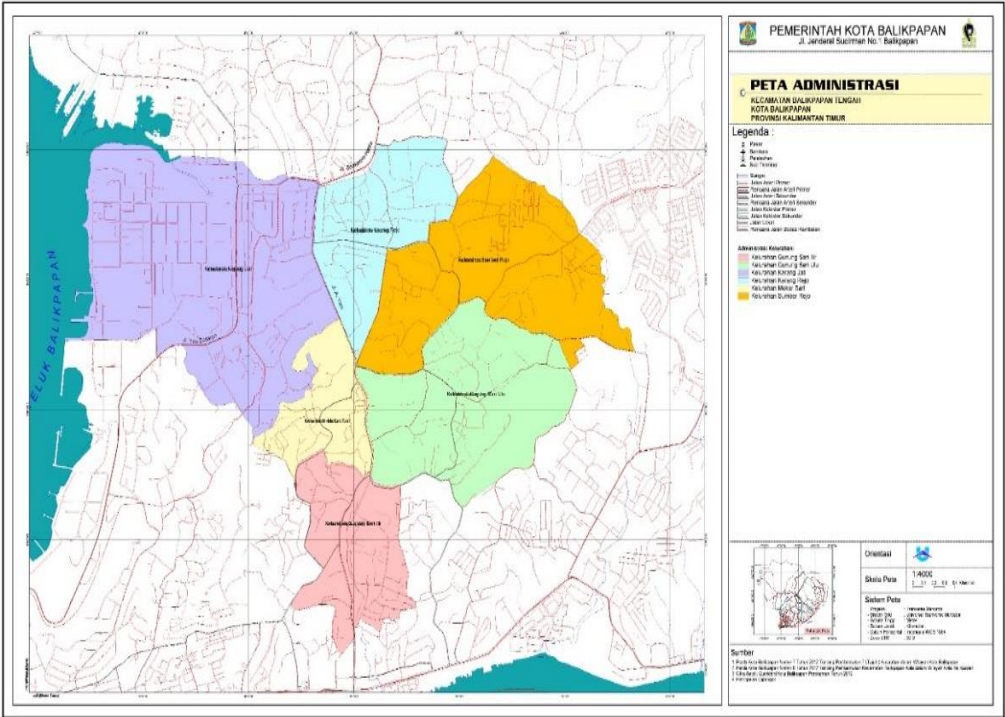
## **2.1.2 Sumber Daya**

### **2.1.2.1 Keadaan Geografi dan Demografi**

Berdasarkan data BPS Kota Balikpapan (2024), secara geografis, Kecamatan Balikpapan Tengah memiliki luas wilayah 1.127 Ha dengan letak dari permukaan laut sekitar 0-25 meter. Jarak dari Balai kota Kota Balikpapan ± 2,1 Km yang di hubungkan oleh jalan Kota dengan bates batas Wilayah Kecamatan sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Barat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Selatan;
- Sebelah Tengah berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Tengah; dan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Selatan.

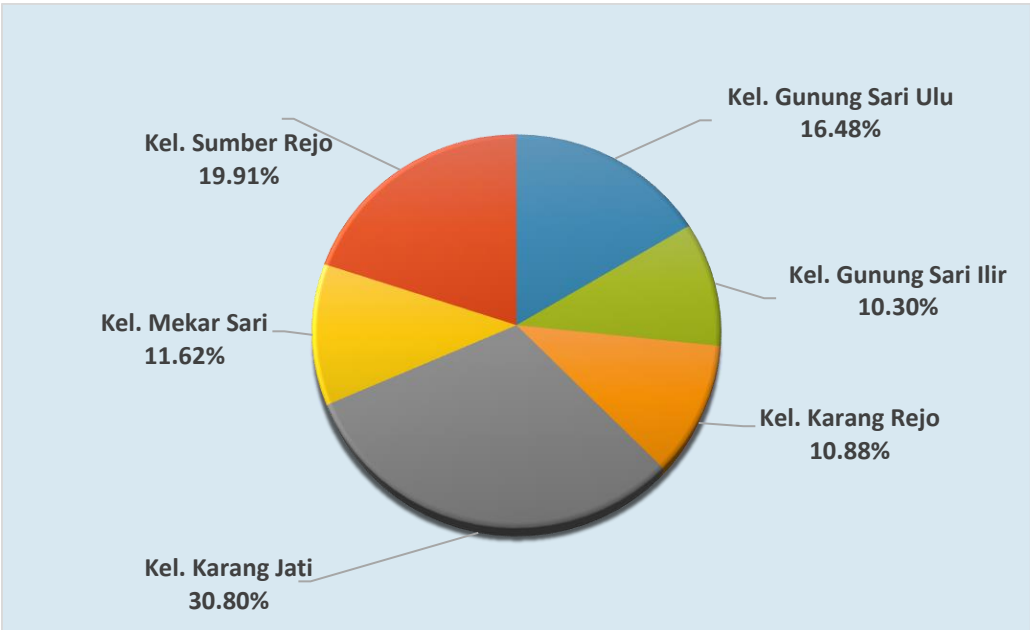
Gambar 2. 2 Peta Administrasi Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan



Dari segi cakupan, Kecamatan Balikpapan Tengah memiliki 6 (enam) Kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Gunung Sari Ulu dengan luas 182 Ha atau 1,82 km<sup>2</sup>
2. Kelurahan Gunung Sari Ilir dengan luas 114 Ha atau 1,14 km<sup>3</sup>
3. Kelurahan Karang Rejo dengan luas 121 Ha atau 1,21 km<sup>2</sup>
4. Kelurahan Karang Jati dengan luas 342 Ha atau 3,41 km<sup>2</sup>
5. Kelurahan Mekar Sari dengan luas 129 Ha atau 1,29 km<sup>3</sup> dan
6. Kelurahan Sumber Rejo dengan luas 221 Ha atau 2,21 km<sup>2</sup>

Grafik 2. 1 Persentase Luas Per Kelurahan di Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan



Sumber: Olah data, 2024

Potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Balikpapan Tengah dari aspek demografi penduduk Kecamatan Balikpapan Tengah berjumlah +/- 105.749 jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 52.867 Jiwa dan Perempuan berjumlah 51.882 Jiwa. Strata pendidikan penduduk Kecamatan Balikpapan Tengah terdiri dari pendidikan SD 8.980 Jiwa, Pendidikan SLTP 13.557 Jiwa, Pendidikan setingkat SLTA 37.085 Jiwa dan setingkat perguruan tinggi 10.481 Jiwa.

**Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelurahan dan jenis Kelamin**

Desa/Kelurahan	Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Gunung Sari Ilir	10,744	10,454	21,198
Gunung Sari Ulu	7,818	7,470	15,288
Mekar Sari	6,541	6,344	12,885
Karang Rejo	12,056	11,762	23,818
Sumber Rejo	10,801	10,236	21,037
Karang Jati	5,907	5,616	11,523
Balikpapan Tengah	53,867	51,882	105,749

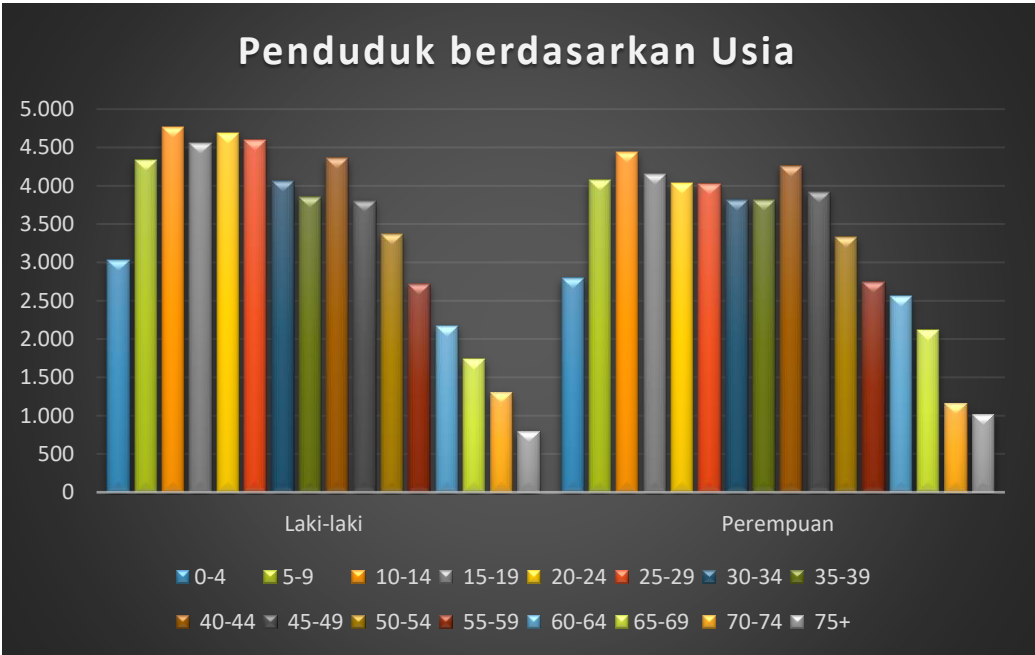
Sumber :BPS 2024

**Tabel 2. 2 Jumlah Rukun Tetangga dan Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan Kelurahan**

Desa/Kelurahan	Rukun Tetangga (RT)	Kepala Keluarga (KK)
(1)	(2)	(3)
Gunung Sari Ilir	69	7,827
Gunung Sari Ulu	39	5,446
Mekar Sari	35	4,724
Karang Rejo	87	8,523
Sumber Rejo	57	7,357
Karang Jati	35	4,117
Balikpapan Tengah	322	37,994

Sumber :BPS 2024

**Grafik 2. 2 Penduduk Kecamatan Balikpapan Tengah berdasarkan Usia**



Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025 Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Jakarta

Komposisi penduduk di Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan berdasarkan usia dan jenis kelamin pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk relatif stabil antara kelompok usia produktif maupun non produktif. Komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin di Kecamatan Balikpapan tengah Kota Balikpapan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni sebesar 70,33 persen dengan rincian 35,89 persen di antaranya laki-laki dan 34,45 persen lainnya adalah perempuan. Penduduk yang berada dalam usia non-produktif didominasi oleh kelompok usia 0-14 tahun yang mencapai 22,02 persen, sedangkan kelompok usia non-produktif lansia hanya 7,65 persen. Usia produktif dianggap sebagai masa seorang individu memasuki usia kerja, yakni 15-64 tahun. Kelompok usia produktif yang lebih banyak dibandingkan non produktif menunjukkan bahwa Kota Balikpapan sedang dalam fase bonus demografi, terutama ketika mempertimbangkan besaran rasio ketergantungan yang dimiliki. Data pada piramida penduduk di atas menunjukkan bahwa Kota Balikpapan memiliki rasio ketergantungan sebesar 43,28 persen. Rasio ketergantungan yang masih berada di bawah angka 45 persen menunjukkan bahwa Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan mengalami bonus demografi pada tahun 2025. Bonus demografi mengindikasikan adanya potensi sumber daya manusia yang dapat dioptimalkan untuk pembangunan di Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, tetapi bonus demografi juga perlu dikelola dengan baik karena akan memengaruhi kondisi di Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan ke depannya.

**2.1.2.2 Peta Rawan Bencana Kecamatan Balikpapan Tengah**

Peta rawan bencana bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi geografis dan tingkat kerentanan di Wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah. Peta rapan bencana Sebagai mana tabel berikut:

Tabel 2. 3 Peta Rawan Bencana Kecamatan Balikpapan Tengah

NO	JENIS BENCANA	LOKASI RAWAN BENCANA	
1.	Banjir	Kelurahan Gunung Sari Ulu	: RT. 19,20 dan 30
		Kelurahan Gunung Sari Ilir	: RT. 1,3,4,28 dan 32
		Kelurahan Karang Rejo	: RT. 1,3,4,5,6,7,8,61,62,63,64,65,dan 66
		Kelurahan Karang Jati	: NIHIL
		Kelurahan Mekar Sari	: RT. 5, 21, dan 24
		Kelurahan Sumber Rejo	: RT. 7,8,16,18,28,40,45,48,58,59
2.	Longsor	Kelurahan Gunung Sari Ulu	: RT.5,8,12,14,15,18,19,20,21,23,24,25,29,30,32,35 dan 39
		Kelurahan Gunung Sari Ilir	: RT.2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,2730,37,49,50,60,62,63 dan 64
		Kelurahan Karang Rejo	: RT. 9,10,13,23, 24 dan 25
		Kelurahan Karang Jati	: RT. 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,18,19 dan 20
		Kelurahan Mekar Sari	: RT. 1, 2, 3, 6, 13, 14, 16, 19, 26, 33, 36, dan 37
		Kelurahan Sumber Rejo	: RT.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,47,56,57 dan 58
3.	Kebakaran	Kelurahan Gunung Sari Ulu	: RT. 30
		Kelurahan Gunung Sari Ilir	: RT. 11 dan 25
		Kelurahan Karang Rejo	: RT. 34,445,47,50,51,52,57,58,59 dan 60
		Kelurahan Karang Jati	: RT. 1 sd 34
		Kelurahan Mekar Sari	: RT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 26, dan 37
		Kelurahan Sumber Rejo	: RT. 1 sd 59

2.1.2.3 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Kecamatan Balikpapan Tengah sebagai Unit Pelayanan Publik yang berkualitas baik dan akuntabel.

Berdasarkan analisis beban kerja, cakupan wilayah yang sangatluas dan perlunya koordinasi yang intens Kecamatan Balikpapan Tengah, SDM yang ada belum memenuhi dari kebutuhan yang seharusnya. Komposisi Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah berdasarkan beberapa kriteria pada tahun 2025 adalah sebagaimana tertera pada Tabel-Tabel

berikut.

**Tabel 2. 4**  
**Rekapitulasi Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<b>Kecamatan Balikpapan Tengah</b>		<b>8</b>	<b>14</b>	<b>22</b>
1	Camat	1	0	1
2	Sekretaris Camat	0	1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan	1	0	1
4	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1	0	1
5	Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat	0	1	1
6	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	0	1	1
7	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	0	1	1
8	Kepala Sub Bagian Umum	0	1	1
9	Pelaksana	5	9	14
<b>Kelurahan Gunung Sari Ulu</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
1	Lurah	1	0	1
2	Sekretaris Lurah	0	1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	0	1	1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1	0	1
6	Pelaksana	3	2	5
<b>Kelurahan Gunung Sari Ilir</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
1	Lurah	1	0	1
2	Sekretaris Lurah	0	1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	0	1	1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1	0	1
6	Pelaksana	2	2	4
<b>Kelurahan Karang Rejo</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
1	Lurah	1	0	1



No.	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2	Sekretaris Lurah	1	0	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	0	1	1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	0	0	0
6	Pelaksana	3	2	5
Kelurahan Karang jati		7	2	9
1	Lurah	1	0	1
2	Sekretaris Lurah	1	0	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	0	1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1	0	1
6	Pelaksana	3	1	4
Kelurahan Mekar Sari		4	4	8
1	Lurah	0	1	1
2	Sekretaris Lurah	0	0	0
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	0	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	0	1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1	0	1
6	Pelaksana	1	3	4
Kelurahan Sumber Rejo		4	3	7
1	Lurah	1	0	1
2	Sekretaris Lurah	0	0	0
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	0	0	0
6	Pelaksana	3	2	5
Total		37	37	74

Sumber: Bazeting Kecamatan Balikpapan Tengah Bulan April 2025

**Tabel 2. 5**  
**Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan**

No	Unit Kerja	Golongan			
PEGAWAI NEGERI SIPIL		IV	III	II	I
1	Kecamatan Balikpapan Tengah	2	13	5	0
2	Kelurahan Gunung Sari Ulu	0	6	1	0
3	Kelurahan Gunung Sari Ilir	0	6	0	0
4	Kelurahan Karang Rejo	0	5	1	0
5	Kelurahan Karang Jati	0	6	1	0
6	Kelurahan Mekar Sari	0	5	0	0
7	Kelurahan Sumber Rejo	0	4	0	0
JUMLAH PNS		2	45	8	0
PPPK		IX	VIII	V	I
1	Kecamatan Balikpapan Tengah	1	0	1	0
2	Kelurahan Gunung Sari Ulu	0	0	2	1
3	Kelurahan Gunung Sari Ilir	1	0	2	0
4	Kelurahan Karang Rejo	0	0	2	1
5	Kelurahan Karang Jati	1	0	1	0
6	Kelurahan Mekar Sari	0	1	2	0
7	Kelurahan Sumber Rejo	1	0	2	0
JUMLAH PPPK		4	1	12	2

Sumber: Data diolah

**Tabel 2. 6**  
**Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Unit Kerja	Pendidikan								
		S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD
1	Kecamatan Balikpapan Tengah	2	9	0	1	1	0	9	0	0
2	Kelurahan Gunung Sari Ulu	0	5	0	0	0	0	3	1	1
3	Kelurahan Gunung Sari Ilir	0	4	1	1	0	0	3	0	0
4	Kelurahan Karang Rejo	0	4	1	0	0	0	3	0	1
5	Kelurahan Karang Jati	0	5	0	1	0	0	3	0	0
6	Kelurahan Mekar Sari	0	1	3	1	0	1	2	0	0
7	Kelurahan Sumber Rejo	0	3	0	0	0	0	4	0	0
TOTAL PEGAWAI		2	31	5	4	1	1	27	1	2

Sumber: Data diolah

**2.1.2.4 Sarana dan Prasarana**

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kecamatan Balikpapan Tengah dibutuhkan adanya peralatan/ perlengkapan kerja atau aset. Secara keseluruhan jumlah peralatan/ perlengkapan kerja atau aset baik berupa barang bergerak yang dikelola Kecamatan Balikpapan Tengah sebesar Rp. 5.494.701.141,00 dirasa masih

belum memadai, dibandingkan dengan cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya. Demikian

juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran dan peralatan yang masih memerlukan peningkatan demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat. Jumlah dan keadaan sarana dan prasarana tertuang dalam tabel berikut :

**Tabel 2. 7 Daftar Aset/ Barang Milik Daerah Kecamatan Balikpapan Tengah**

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Gedung Bangunan	10	Baik
2	Aula	5	Baik
3	Rumah Jabatan	4	Baik
4	Taman Bermain	1	Baik
5	Station Wagon	7	Baik
6	Jeep	1	Baik
7	Pick Up	1	Baik
8	Mobil Jenazah	1	Baik
9	Sepeda Motor	29	Baik
10	Kendaraan roda 3/ Alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	2	Baik
11	A.C. Split/Window	63	Baik
12	APAR/Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	5	Baik
13	Alat Kantor Lainnya	7	Baik
14	alat kesehatan kerja lainnya (dst)	1	Baik
15	Alat Pengasapan	1	Baik
16	Alat Penghancur Kertas	2	Baik
17	alat pengolahan tanah dan tanaman lainnya (dst)	1	Baik
18	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)	1	Baik
19	Alat Rumah Tangga Lain-lain	25	Baik
20	Brandkas/Peti Uang/Cash Box/Coin Box	8	Baik
21	Buffet Kaca/Rak-Rak Penyimpan/Besi/Kayu	9	Baik
22	Camera Electronic/Lensa Kamera/Tustel/Handy Cam	11	Baik
23	CCTV - Camera Control Television System	7	Baik
24	CPU (Peralatan Mainframe/Peralatan Personal Komputer)	12	Baik
25	Dispenser	10	Baik
26	Facsimile	2	Baik
27	Filing Cabinet Besi	29	Baik
28	Generator/Generator Set(Lab Scale)/Grating Generator Unit	6	Baik
29	Gergaji Chain Saw/Mesin Blower Listrik / Mekanik	4	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
30	Global Positioning System	1	Baik
31	Gordyin/Kray/Vertikal Blind	7	Baik
32	Handy Talky (HT)	2	Baik
33	Karpet	1	Baik
34	Kipas Angin	11	Baik
35	Kursi Kerja/rapat/Pelayanan/Sofa	136	Baik
36	Lap Top/Note Book	27	Baik
37	Lemari Es	9	Baik
38	Lemari Besi/Metal/Kaca/Kayu/Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis/Perpustakaan	48	Baik
39	Loudspeaker	5	Baik
40	Meja kerja/Rapat/pelayanan/komputer/makan/sofa	94	Baik
41	Mesin Absensi	12	Baik
42	Mesin Cuci	1	Baik
43	Mesin Fotocopy Folio	7	Baik
44	Mesin Ketik Listrik/Manual Portable/ Standard	5	Baik
45	Mesin Pemotong Rumput	21	Baik
46	Mesin Penghalus	1	Baik
47	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner/Vacum Pump	2	Baik
48	Meubeleur lainnya	10	Baik
49	Microphone/Wireless MIC	6	Baik
50	Monitor/Screen	8	Baik
51	Motuary Refrigerator	1	Baik
52	Overhead Projector/Layar Film/Projector	3	Baik
53	P.C Unit/Personal Komputer/Computer Compatible/Komputer Jaringan lainnya/Distiling Apparatus	97	Baik
54	Papan Visual>Nama Instansi/Pengumuman	11	Baik
55	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2	Baik
56	Peralatan Minikomputer lainnya	1	Baik
57	peralatan studio audio lainnya (dst)	7	Baik
58	Pompa Air	1	Baik
59	Portable Generating Set	5	Baik
60	Power Amplifier	1	Baik
61	Printer/Line Printer (Peralatan Personal Komputer)	68	Baik
62	recorder display lainnya (dst)	2	Baik
63	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	12	Baik
64	Sound System	7	Baik
65	Stabilizer	1	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
66	Tabung Gas	1	Baik
67	Tangga Aluminium	3	Baik
68	Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran)	1	Baik
69	Telephone (PABX)	1	Baik
70	Televisi/TV Monitor	19	Baik
71	Tempat Air Suling	1	Baik
72	Tempat Tidur Besi/Kayu	6	Baik
73	Tenda	1	Baik
74	Termometer Standar	7	Baik
75	Uninterruptible Power Supply (UPS)	9	Baik
76	Unit Tranceiver VHF Portable	1	Baik
77	White Board	2	Baik
78	Wireless/Wireless Amplifier	9	Baik

**2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah**

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga ataupun memberikan pelayanan kepada warga yang memenuhi kewajibannya terhadap Pemerintah. Pelayanan di Kecamatan Balikpapan Tengah adalah jenis pelayanan administrasi dengan pola pelayanan teknis fungsional dan pola pelayanan elektronik. Pola Pelayanan Kecamatan menggunakan suatu sistem terpadu yang disebut Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan yang berproses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui satu loket pelayanan, warga cukup menyerahkan berkas ke petugas meja/loket pelayanan, duduk menunggu sejenak, kemudian dipanggil untuk menerima dokumen yang sudah selesai

Layanan yang tersedia di Kecamatan Balikpapan Tengah adalah :

- Layanan Penerbitan Izin Membuka Tanah Negara < 5.000 M2
- Layanan Pelayanan Penerbitan Perpanjangan Izin Membuka Tanah Negara
- Layanan Pelayanan Surat Pernyataan Ahli Waris
- Layanan Pelayanan Surat Kuasa Ahli Waris
- Layanan Pelayanan Dispensasi Nikah
- Layanan Pelayanan Surat Keterangan
- Layanan Pelayanan Perubahan Kartu Keluarga
- Layanan Pelayanan Peminjaman Mobil Jenazah

**2.1.3.1 Pencapaian Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah**

Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan tertuang dalam Renstra, Berdasarkan

Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang diukur melalui 3 (tiga) indikator sasaran. Berdasarkan pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. 8**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				N/A	N/A	80,85	81	81,15	N/A	N/A	80,75	86,63	90,31	N/A	N/A	99,88	106,95	111,29
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				N/A	N/A	70	70,15	70,68	N/A	N/A	69,97	65,56	67,67	N/A	N/A	99,96	93,46	95,74

Dari tabel 2.8 diatas dapat disimpulkan bahwa target RENSTRA pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 - 2025 dapat tercapai, dengan kata lain kinerja Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Balikpapan Tengah memiliki kategori Baik. Bahkan untuk beberapa kegiatan tertentu capaian kinerjanya sesuai target kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan capaian Kinerja pada periode RENTRA sebelumnya ini dapat dijadikan acuan dalam menentukan target pada RENSTRA selanjutnya dan dapat dijadikan pendorong untuk kinerja selanjutnya agar menjadi lebih baik.

#### **2.1.3.2 Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Balikpapan Tengah**

Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Wali Kota selaku kepala Daerah terpilih yang ercantum dokumen perencanaan RPJMD, juga dapat tergambar melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan sebagaimana dapat terlihat pada tabel berikut:



**Tabel 2. 9**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Balikpapan Tengah**  
**Kota Balikpapan**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGA RAN	REALISA SI
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.890.617.184	15.268.849.346	15.959.606.800	23.040.147.724	N/A	14.808.702.105	13.089.927.715	11.422.278.513	19.575.295.883	N/A	99%	86%	72%	85%	16%	-3%
Program Penyelenggara n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	3.115.055.250	739.255.600	355.988.900	278.181.900	N/A	3.077.758.988	691.389.800	349.035.300	271.704.700	N/A	99%	94%	98%	98%	-59%	-58%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.940.440.474	4.853.656.190	12.773.942.150	17.493.336.030	N/A	1.870.816.675	4.802.905.096	14.658.307.622	17.144.313.423	N/A	96%	99%	115%	98%	120%	120%
Program Koordinasi Dan Ketertiban Umum	47.905.000	261.884.000	898.351.700	840.153.200	N/A	47.906.000	256.970.700	865.191.225	826.587.400	N/A	100%	98%	96%	98%	138%	136%
JUMLAH	19.994.017.908	21.123.645.136	29.987.889.550	41.651.818.854	-	19.805.183.768	18.841.193.311	27.294.812.660	37.817.901.406		99%	94%	95%	95%	54%	48,70%

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan**

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan pada dasarnya mencakup semua pihak yang menjadi penerima manfaat dari fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, Berikut pembagian Kelompok Sasaran berdasarkan Jenis Layanan Kecamatan Balikpapan Tengah :

##### **1. Warga & Penduduk**

- Penduduk tetap (pemilik KTP Kota Balikpapan, domisili di Balikpapan Tengah)
- Penduduk non-permanen (pendatang, pekerja kontrak, mahasiswa, dll.)
- Penduduk rentan: lansia, penyandang disabilitas, anak yatim/piatu, korban bencana

Jenis layanan terkait:

Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KK, akta lahir/kematian), perizinan, rekomendasi, surat keterangan, layanan pengaduan.

##### **2. Kelompok Usaha & Ekonomi**

- UMKM lokal (pedagang pasar, warung, home industry)
- Pelaku usaha formal (perusahaan, koperasi)
- Pelaku ekonomi kreatif (kuliner, kerajinan, jasa digital)

Jenis layanan terkait:

Rekomendasi usaha, fasilitasi perizinan OSS/PBG, pembinaan UMKM, pelatihan kewirausahaan.

##### **3. Komunitas & Organisasi Masyarakat**

- RT/RW dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)
- Karang Taruna, PKK, Posyandu
- Organisasi keagamaan, adat, sosial
- Organisasi kepemudaan (Pramuka, komunitas hobi, klub olahraga)

Jenis layanan terkait:

Fasilitasi kegiatan sosial-budaya, dukungan sarana/prasarana, pemberdayaan masyarakat, penanganan masalah sosial.

##### **4. Kelompok Rentan & Perlindungan Khusus**

- Anak-anak (program ramah anak, perlindungan anak)
- Perempuan (program pemberdayaan dan perlindungan perempuan)
- Lansia
- Masyarakat miskin dan terdampak bencana

Jenis layanan terkait:

Bantuan sosial, perlindungan terpadu berbasis masyarakat (PPATBM), penanganan KDRT, pendampingan korban bencana.

#### 5. Institusi Pendidikan & Kesehatan

- Sekolah dan madrasah di wilayah kecamatan
- Puskesmas, posyandu, klinik
- Perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berlokasi di wilayah kecamatan

Jenis layanan terkait:

Pembinaan sekolah, kegiatan kesehatan masyarakat, vaksinasi, sosialisasi pencegahan penyakit.

#### 6. Aparatur & Mitra Kerja Pemerintahan

- ASN dan staf kelurahan
- Polsek, Koramil, dan instansi vertikal lainnya
- DP3AKB, Disdikbud, Dinkes, Disperindag, dan OPD terkait
- BUMN/BUMD dan CSR perusahaan di wilayah

Jenis layanan terkait:

Koordinasi program pembangunan, penegakan peraturan, pengawasan lingkungan dan ketertiban.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah

Permasalahan pembangunan daerah di Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan merupakan upaya untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan pembangunan yang perlu direspons oleh Pemerintah Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan selama lima tahun mendatang.

**Tabel 2. 10**  
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah
(1)	(2)	(3)
Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat serta Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan Balikpapan Tengah	Belum optimalnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	-Minimnya Sarpas Pelayanan -Minimnya Kuantitas dan Kualitas SDM  -Belum terbangunnya integrasi pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan
	Masih rendahnya keterlibatan komponen masyarakat dalam pembangunan	Minimnya Akses, kurangnya sosialisasi tentang pentingnya partisipasi Masyarakat dalam pembangunan
	Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif	Minimnya Akses, kurangnya sosialisasi tentang pentingnya partisipasi Masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif
	Masih tingginya kasus Pencemaran Lingkungan	-Pengelolaan sampah yang kurang maksimal -Pelanggaran Site Plant -Pelanggaran Tata Ruang -Warga Membuang Sampah -Limbah Industri
	Kurang ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum	-Keterbatasan Lahan -Keterbatasan Anggaran -Perencanaan kegiatan yag kurang baik
	Meningkatnya Jumlah Penduduk dan mobilitas Masyarakat	Tuntutan pelayanan yang cepat dan responsif terhadap tingginya mobilitas warga

### **2.2.2 Isu Strategis**

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renstra sebelumnya, prediksi permasalahan dan tantangan 5 (lima) tahun ke depan, isu tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Kecamatan Balikpapan Tengah dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, sebagai berikut :

**Tabel 2. 11 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah**

No.	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	Belum optimalnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Masih adanya pelanggaran terhadap peraturan pemerintah	Perubahan Iklim, Urbanisasi/Mobilitas Masyarakat Internalisasional	Pembangunan Ibukota Negara Nusantara (IKN)	Isu Strategis dalam RPJMD Kota Balikpapan : Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Tingkat Kecamatan Balikpapan Tengah
		Masih rendahnya keterlibatan komponen masyarakat dalam pembangunan					
		Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif					
		Masih tingginya kasus Pencemaran Lingkungan					
		Kurang ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum					
		Meningkatnya Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat					
		Meningkatnya Jumlah Penduduk dan Mobilitas Masyarakat					
		Belum optimalnya penanganan bencana					

### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2025-2029 didasarkan pada analisis terhadap isu strategis serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

##### 3.1 Tujuan

Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Balikpapan Tengah dalam urusan pelayanan publik, maka tujuan jangka menengah yang ditetapkan pada Kecamatan Balikpapan Tengah dapat diuraikan sebagai berikut :

**“Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan”**

##### 3.2 Sasaran

Sasaran merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam melayani masyarakat yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Balikpapan Tengah adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas Koordinasi dan Fungsi Kewilayahan di Tingkat Kecamatan;
- 2) Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Balikpapan Tengah beserta indikator kinerjanya dapat disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3. 1**  
**Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH</b>											
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	90,31	90,46	90,61	90,76	90,91	91,06	91,21	
		Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan.	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	67,67	68,84	70,07	71,3	72,53	73,76	75	



3.3 Strategi

Sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat kewilayahan, Kecamatan Balikpapan Tengah memiliki peran strategis untuk penguatan fungsi koordinasi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan berbasis kewilayahan serta penguatan ketentraman dan ketertiban umum sebagai bagian integrasi dari urusan pemerintahan umum dengan melakukan pentahapan strategi sebagai berikut:

**Tabel 3. 2**  
**Pentahapan Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah**

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Prima dan Adaptif	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Prima dan Adaptif	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Prima dan Adaptif	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Prima dan Adaptif	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Prima dan Adaptif

3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Balikpapan Tengah dalam Mencapai

Tujuan dan Sasaran Renstra 2025 – 2029

Arah kebijakan Kecamatan difokuskan pada terwujudnya penyelenggaraan urusan kewilayahan yang efektif, adaptif, dan akuntabel, dengan prioritas pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan akses dan mutu pelayanan publik, sinergi antar pemangku kepentingan, serta pengembangan inovasi pelayanan sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Kebijakan ini disusun untuk memastikan kesinambungan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat kewilayahan, sehingga seluruh tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan dapat dicapai secara terukur, efektif, dan berkelanjutan. Adapun Arah Kebijakan Kecamatan Balikpapan Tengah sebagai mana tertuang dalam tabel berikut

**Tabel 3. 3**  
**Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah**

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Pengembangan SPBE untuk meningkatkan kualitas pelayanan	1. Penguatan Pelayanan Publik	
			2. Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	
			3. Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	
			4. Penguatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			5. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan	
			6. Pengembangan Sumber Daya Manusia Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

BAB IV  
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2025-2029 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan selama periode renstra di atas. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

- 1) Mempedomani RKJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029;
- 2) Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2025-2030, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Balikpapan.
- 3) Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Balikpapan;
- 4) Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Balikpapan Tengah;
- 5) Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan;
- 6) Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan.

**Tabel 4. 1**  
**Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH</b>							
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)		
		Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan.			Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan (%)		
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang Dilayani	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Sesuai Standar Pelayanan			
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan		Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Tercapai Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
					Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	7.01.03.2.03.0005 - Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
					Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
		Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		Terselenggaranya ketenteraman dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terwujudnya Kecamatan Taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial		Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terwujudnya profesionalisme aparatur perangkat daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terwujudnya layanan umum perkantoran perangkat daerah.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terwujudnya operasional umum perangkat daerah.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar berfungsi optimal.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN GUNUNG SARI ULU							
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan.	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan		Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Tercapai Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)		
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan		Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial				
				Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
7.01.0.00.0.00.02.0002 - KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR							
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan.	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan		Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Tercapai Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		Persentase Pengaduan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				dan Peraturan Kepala Daerah	Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial		Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0003 - KELURAHAN KARANG REJO</b>							
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan.	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan		Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Tercapai Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)		
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan		Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial				
				Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
7.01.0.00.0.00.02.0004 - KELURAHAN KARANG JATI							
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan.	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan		Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial		Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0005 - KELURAHAN MEKAR SARI</b>							
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan.	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan		Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)		
					Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tercapai Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terwujudnya Kecamatan Taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial		Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
7.01.0.00.0.00.02.0006 - KELURAHAN SUMBER REJO							
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan,	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
bersih dan akuntabel		Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan.	Pelayanan Publik di Kecamatan		Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)		
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan  Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan		Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Tercapai Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terwujudnya Kecamatan Taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial		Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

#### 4.2. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan 2025–2029, disusun rencana program, kegiatan, dan subkegiatan beserta pendanaan indikatif sebagai acuan pelaksanaan pembangunan di tingkat kewilayahan.

Adapun Rumusan rencana program, kegiatan dan subkegiatan beserta Pendanaan Kecamatan Balikpapan Tengah selama periode Tahun 2025- 2029 sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				41.108.397.110		42.881.316.000		45.025.382.000		45.925.890.000		47.303.667.000		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				23.068.177.114		25.662.918.000		26.949.549.000		27.496.742.000		28.327.058.000		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	86,63	87,25	23.068.177.114	87,5	25.662.918.000	87,75	26.949.549.000	88	27.496.742.000	88,25	28.327.058.000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				38.480.000		52.155.000		54.597.000		55.860.000		57.535.000		
Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	2	38.480.000	3	52.155.000	3	54.597.000	3	55.860.000	3	57.535.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	3		4		4		4		5			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14.800.000		20.862.000		21.738.000		22.344.000		23.014.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	3	14.800.000	4	20.862.000	4	21.738.000	4	22.344.000	5	23.014.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23.680.000		31.293.000		32.859.000		33.516.000		34.521.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	2	23.680.000	3	31.293.000	3	32.859.000	3	33.516.000	3	34.521.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.462.279.956		14.979.467.000		15.754.140.000		16.026.891.000		16.513.276.000		
Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	82	82	14.462.279.956	79	14.979.467.000	79	15.754.140.000	79	16.026.891.000	79	16.513.276.000		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.462.279.956		14.979.467.000		15.754.140.000		16.026.891.000		16.513.276.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	82	82	14.462.279.956	79	14.979.467.000	79	15.754.140.000	79	16.026.891.000	79	16.513.276.000		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				599.520.000		886.635.000		931.005.000		949.620.000		978.095.000		
Terwujudnya profesionalisme aparatur perangkat daerah.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	599.520.000	1	886.635.000	1	931.005.000	1	949.620.000	1	978.095.000		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	0	65		79		79		79		79			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				99.520.000		104.310.000		109.530.000		111.720.000		115.070.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	99.520.000	1	104.310.000	1	109.530.000	1	111.720.000	1	115.070.000		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis				500.000.000		782.325.000		821.475.000		837.900.000		863.025.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	0	65	500.000.000	79	782.325.000	79	821.475.000	79	837.900.000	79	863.025.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.087.667.700		2.819.645.000		2.962.785.000		3.022.026.000		3.112.642.000		
Terwujudnya layanan umum perkantoran perangkat daerah.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	2.087.667.700	24	2.819.645.000	24	2.962.785.000	24	3.022.026.000	24	3.112.642.000		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5	5		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0		300		300		300		300			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	16	8		10		10		10		10			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10	10		10		10		10					
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	21	2		5		5		5		5			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi  Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				85.264.620		104.310.000		109.530.000		111.720.000		115.070.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	85.264.620	1	104.310.000	1	109.530.000	1	111.720.000	1	115.070.000		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				108.253.110		521.550.000		547.650.000		558.600.000		575.350.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	21	2	108.253.110	5	521.550.000	5	547.650.000	5	558.600.000	5	575.350.000		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		15.000.000		16.429.000		16.758.000		17.260.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	2	0	2	15.000.000	2	16.429.000	2	16.758.000	2	17.260.000		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				839.788.460		990.945.000		1.040.535.000		1.061.340.000		1.093.165.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	16	8	839.788.460	10	990.945.000	10	1.040.535.000	10	1.061.340.000	10	1.093.165.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				286.658.150		312.930.000		328.590.000		335.160.000		345.210.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	2	286.658.150	2	312.930.000	2	328.590.000	2	335.160.000	2	345.210.000		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				131.497.500		140.818.000		147.865.000		150.822.000		155.344.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	131.497.500	24	140.818.000	24	147.865.000	24	150.822.000	24	155.344.000		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				51.705.860		62.586.000		65.718.000		67.032.000		69.042.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5	5	51.705.860	10	62.586.000	10	65.718.000	10	67.032.000	10	69.042.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				569.500.000		625.860.000		657.180.000		670.320.000		690.420.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10	10	569.500.000	10	625.860.000	10	657.180.000	10	670.320.000	10	690.420.000		
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		30.000.000		32.859.000		33.516.000		34.521.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	0	300	30.000.000	300	32.859.000	300	33.516.000	300	34.521.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				15.000.000		15.646.000		16.429.000		16.758.000		17.260.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	15.000.000	1	15.646.000	1	16.429.000	1	16.758.000	1	17.260.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				907.200.000		1.346.299.000		1.431.775.000		1.460.402.000		1.504.194.000		
Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	5	907.200.000	5	1.346.299.000	5	1.431.775.000	5	1.460.402.000	5	1.504.194.000		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	0		5		5		5		5			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	6		6		6		6		6			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Lainnya yang Disediakan (Unit)													
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				93.600.000		97.634.000		102.520.000		104.569.000		107.705.000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3	1	93.600.000	1	97.634.000	1	102.520.000	1	104.569.000	1	107.705.000		
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				561.600.000		585.804.000		615.120.000		627.419.000		646.233.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	6	561.600.000	6	585.804.000	6	615.120.000	6	627.419.000	6	646.233.000		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		150.000.000		164.295.000		167.580.000		172.605.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	5	0	5	150.000.000	5	164.295.000	5	167.580.000	5	172.605.000		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		150.000.000		164.295.000		167.580.000		172.605.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	0	0	5	150.000.000	5	164.295.000	5	167.580.000	5	172.605.000		
7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				252.000.000		262.861.000		276.015.000		281.534.000		289.976.000		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	252.000.000	1	262.861.000	1	276.015.000	1	281.534.000	1	289.976.000		
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		100.000.000		109.530.000		111.720.000		115.070.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	2	100.000.000	2	109.530.000	2	111.720.000	2	115.070.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.323.943.258		3.624.154.000		3.805.518.000		3.881.607.000		3.998.000.000		
Terwujudnya operasional umum perangkat daerah.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	36	3.323.943.258	36	3.624.154.000	36	3.805.518.000	36	3.881.607.000	36	3.998.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	24		36		36		36		36			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				474.407.168		494.854.000		519.618.000		530.007.000		545.900.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	36	474.407.168	36	494.854.000	36	519.618.000	36	530.007.000	36	545.900.000		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.849.536.090		3.129.300.000		3.285.900.000		3.351.600.000		3.452.100.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	24	2.849.536.090	36	3.129.300.000	36	3.285.900.000	36	3.351.600.000	36	3.452.100.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang				1.649.086.200		1.954.563.000		2.009.729.000		2.100.336.000		2.163.316.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Urusan Pemerintahan Daerah														
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar berfungsi optimal.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	45	37	1.649.086.200	47	1.954.563.000	47	2.009.729.000	47	2.100.336.000	47	2.163.316.000		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7	9		10		10		10		10			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	187	232		232		232		232		232			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	10		0		0		0		0			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	20		20		20		20		20			
	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						23.807.000				41.724.000			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	1	1	23.807.000	1	41.724.000	1	43.812.000	1	44.688.000	1	46.028.000		

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.034.865.410		1.735.294.000		1.812.125.000		1.844.359.000		1.893.666.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	1.034.865.410	100	1.735.294.000	100	1.812.125.000	100	1.844.359.000	100	1.893.666.000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan  Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				535.616.120		730.170.000		766.710.000		782.040.000		805.490.000		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	3	6	535.616.120	6	730.170.000	6	766.710.000	6	782.040.000	6	805.490.000		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				535.616.120		730.170.000		766.710.000		782.040.000		805.490.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	3	6	535.616.120	6	730.170.000	6	766.710.000	6	782.040.000	6	805.490.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Instansi Vertikal Terkait (Laporan)													
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				77.369.355		104.310.000		109.530.000		111.720.000		115.070.000		
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang Dilayani Sesuai Standar Pelayanan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	300	300	77.369.355	300	104.310.000	300	109.530.000	300	111.720.000	300	115.070.000		
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				77.369.355		104.310.000		109.530.000		111.720.000		115.070.000		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	300	300	77.369.355	300	104.310.000	300	109.530.000	300	111.720.000	300	115.070.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	1.034.865.410	100	1.735.294.000	100	1.812.125.000	100	1.844.359.000	100	1.893.666.000	7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN GUNUNG SARI ULU	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan				35.336.245		104.685.000		109.924.000		312.122.000		115.484.000		
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	0	4	35.336.245	4	104.685.000	4	109.924.000	4	312.122.000	4	115.484.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Instansi Vertikal Terkait (Laporan)													
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				35.336.245		104.685.000		109.924.000		312.122.000		115.484.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	4	35.336.245	4	104.685.000	4	109.924.000	4	312.122.000	4	115.484.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	1.034.865.410	100	1.735.294.000	100	1.812.125.000	100	1.844.359.000	100	1.893.666.000	7.01.0.00.0.00.02.0002 - KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan				43.840.220		130.846.000		337.394.000		140.141.000		144.343.000		
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	4	43.840.220	4	130.846.000	4	337.394.000	4	140.141.000	4	144.343.000		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan				43.840.220		130.846.000		337.394.000		140.141.000		144.343.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	4	43.840.220	4	130.846.000	4	337.394.000	4	140.141.000	4	144.343.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	1.034.865.410	100	1.735.294.000	100	1.812.125.000	100	1.844.359.000	100	1.893.666.000	7.01.0.00.0.00.02.0003 - KELURAHAN KARANG REJO	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan  Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				51.531.540		145.846.000		153.144.000		156.206.000		160.890.000		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	4	51.531.540	4	145.846.000	4	153.144.000	4	156.206.000	4	160.890.000		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				51.531.540		145.846.000		153.144.000		156.206.000		160.890.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	0	4	51.531.540	4	145.846.000	4	153.144.000	4	156.206.000	4	160.890.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)													
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	1.034.865.410	100	1.735.294.000	100	1.812.125.000	100	1.844.359.000	100	1.893.666.000	7.01.0.00.0.00.02.0004 - KELURAHAN KARANG JATI	
	Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan				185.060.000		97.508.000		102.388.000		104.435.000		107.567.000		
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	4	185.060.000	4	97.508.000	4	102.388.000	4	104.435.000	4	107.567.000		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				185.060.000		97.508.000		102.388.000		104.435.000		107.567.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	0	4	185.060.000	4	97.508.000	4	102.388.000	4	104.435.000	4	107.567.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)													
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	1.034.865.410	100	1.735.294.000	100	1.812.125.000	100	1.844.359.000	100	1.893.666.000	7.01.0.00.0.00.02.0005 - KELURAHAN MEKAR SARI	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan				45.579.730		301.097.000		106.156.000		108.279.000		111.525.000		
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	4	45.579.730	4	301.097.000	4	106.156.000	4	108.279.000	4	111.525.000		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				45.579.730		301.097.000		106.156.000		108.279.000		111.525.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	4	45.579.730	4	301.097.000	4	106.156.000	4	108.279.000	4	111.525.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di	100	100	1.034.865.410	100	1.735.294.000	100	1.812.125.000	100	1.844.359.000	100	1.893.666.000	7.01.0.00.0.00.02.0006 - KELURAHAN SUMBER REJO	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelayanan Publik di Kecamatan	Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)													
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan				60.532.200		120.832.000		126.879.000		129.416.000		333.297.000		
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	4	60.532.200	4	120.832.000	4	126.879.000	4	129.416.000	4	333.297.000		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				60.532.200		120.832.000		126.879.000		129.416.000		333.297.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	4	60.532.200	4	120.832.000	4	126.879.000	4	129.416.000	4	333.297.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				15.905.055.654		13.800.590.000		14.494.521.000		14.782.752.000		15.226.869.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan	23,37	24,5	15.905.055.654	25	13.800.590.000	25,5	14.494.521.000	26	14.782.752.000	26	15.226.869.000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	masyarakat di wilayah kecamatan (%)	100												
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)		100				100				100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				224.877.185		234.697.000		245.405.000		251.370.000		258.907.000		
Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	2	3	224.877.185	3	234.697.000	3	245.405.000	3	251.370.000	3	258.907.000		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	30	80				80				80			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				91.396.380		93.879.000		98.577.000		100.548.000		103.563.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	30	80	91.396.380	80	93.879.000	80	98.577.000	80	100.548.000	80	103.563.000		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				133.480.805		140.818.000		146.828.000		150.822.000		155.344.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	2	3	133.480.805	3	140.818.000	3	146.828.000	3	150.822.000	3	155.344.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga				1.593.680.835		1.922.304.000		2.019.352.000		2.060.648.000		2.123.288.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan														
Tercapai Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	0	0	1.593.680.835	1	1.922.304.000	1	2.019.352.000	1	2.060.648.000	1	2.123.288.000		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	0	326		326		326		326		326			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	5	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2	1		1		1		1		1			
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				672.896.625		730.170.000		766.710.000		782.040.000		805.490.000		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	5	3	672.896.625	3	730.170.000	3	766.710.000	3	782.040.000	3	805.490.000		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				185.500.000		198.189.000		208.107.000		212.268.000		218.633.000		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan	0	326	185.500.000	326	198.189.000	326	208.107.000	326	212.268.000	326	218.633.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)													
7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan				0		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				499.845.500		730.170.000		766.710.000		782.040.000		805.490.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	2	2	499.845.500	2	730.170.000	2	766.710.000	2	782.040.000	2	805.490.000		
7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				235.438.710		260.775.000		273.825.000		279.300.000		287.675.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2	1	235.438.710	1	260.775.000	1	273.825.000	1	279.300.000	1	287.675.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	23,37	24,5	15.905.055.654	25	13.800.590.000	25,5	14.494.521.000	26	14.782.752.000	26	15.226.869.000	7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN GUNUNG SARI ULU	
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100				100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.015.881.650		561.967.000		590.091.000		601.890.000		619.938.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	0	1.015.881.650	1	561.967.000	1	590.091.000	1	601.890.000	1	619.938.000		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	45	43		43		43		43		43			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	108	53		5		5		5		5			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				29.596.330		33.639.000		35.323.000		36.029.000		37.110.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	45	43	29.596.330	43	33.639.000	43	35.323.000	43	36.029.000	43	37.110.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				862.285.320		342.136.000		359.258.000		366.441.000		377.429.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	108	53	862.285.320	5	342.136.000	5	359.258.000	5	366.441.000	5	377.429.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				124.000.000		180.977.000		190.034.000		193.834.000		199.646.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2	124.000.000	2	180.977.000	2	190.034.000	2	193.834.000	2	199.646.000		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				0		5.215.000		5.476.000		5.586.000		5.753.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	0	0	1	5.215.000	1	5.476.000	1	5.586.000	1	5.753.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				916.731.450		956.522.000		1.004.390.000		1.024.472.000		1.055.191.000		
Tercapai Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	44	41	916.731.450	41	956.522.000	41	1.004.390.000	41	1.024.472.000	41	1.055.191.000		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				916.731.450		956.522.000		1.004.390.000		1.024.472.000		1.055.191.000		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	44	41	916.731.450	41	956.522.000	41	1.004.390.000	41	1.024.472.000	41	1.055.191.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	23,37	24,5	15.905.055.654	25	13.800.590.000	25,5	14.494.521.000	26	14.782.752.000	26	15.226.869.000	7.01.0.00.0.00.02.0002 - KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.252.323.420		919.752.000		965.778.000		985.089.000		1.014.628.000		
Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		53	1.252.323.420	5	919.752.000	5	965.778.000	5	985.089.000	5	1.014.628.000		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	73	71		71		71		71		71			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				37.063.660		55.545.000		58.324.000		59.490.000		61.274.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	73	71	37.063.660	71	55.545.000	71	58.324.000	71	59.490.000	71	61.274.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.077.259.760		575.791.000		604.605.000		616.694.000		635.186.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		53	1.077.259.760	5	575.791.000	5	604.605.000	5	616.694.000	5	635.186.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				138.000.000		283.201.000		297.373.000		303.319.000		312.415.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2	138.000.000	2	283.201.000	2	297.373.000	2	303.319.000	2	312.415.000		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				0		5.215.000		5.476.000		5.586.000		5.753.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	0	0	1	5.215.000	1	5.476.000	1	5.586.000	1	5.753.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.484.953.493		1.549.003.000		1.626.520.000		1.659.042.000		1.708.789.000		
Tercapai Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	71	69	1.484.953.493	69	1.549.003.000	69	1.626.520.000	69	1.659.042.000	69	1.708.789.000		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.484.953.493		1.549.003.000		1.626.520.000		1.659.042.000		1.708.789.000		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	71	69	1.484.953.493	69	1.549.003.000	69	1.626.520.000	69	1.659.042.000	69	1.708.789.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah	23,37	24,5	15.905.055.654	25	13.800.590.000	25,5	14.494.521.000	26	14.782.752.000	26	15.226.869.000	7.01.0.00.0.00.02.0003 - KELURAHAN KARANG REJO	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembangunan di Kecamatan	pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)													
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.752.824.555		1.149.754.000		1.207.292.000		1.231.433.000		1.268.358.000		
Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2	1.752.824.555	2	1.149.754.000	2	1.207.292.000	2	1.231.433.000	2	1.268.358.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	170	64		5		5		5		5			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	91	89		89		89		89		89			
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				45.770.900		69.626.000		73.111.000		74.573.000		76.809.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam	91	89	45.770.900	89	69.626.000	89	73.111.000	89	74.573.000	89	76.809.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)													
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.241.771.435		725.997.000		762.328.000		777.571.000		800.887.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	170	64	1.241.771.435	5	725.997.000	5	762.328.000	5	777.571.000	5	800.887.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				465.282.220		348.916.000		366.377.000		373.703.000		384.909.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2	465.282.220	2	348.916.000	2	366.377.000	2	373.703.000	2	384.909.000		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				0		5.215.000		5.476.000		5.586.000		5.753.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	0	0	1	5.215.000	1	5.476.000	1	5.586.000	1	5.753.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.696.052.985		1.773.270.000		1.862.010.000		1.899.240.000		1.956.190.000		
Tercapai Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	89	87	1.696.052.985	87	1.773.270.000	87	1.862.010.000	87	1.899.240.000	87	1.956.190.000		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.696.052.985		1.773.270.000		1.862.010.000		1.899.240.000		1.956.190.000		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	89	87	1.696.052.985	87	1.773.270.000	87	1.862.010.000	87	1.899.240.000	87	1.956.190.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Lembaga Kemasyarakatan)													
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	23,37	24,5	15.905.055.654	25	13.800.590.000	25,5	14.494.521.000	26	14.782.752.000	26	15.226.869.000	7.01.0.00.0.00.02.0004 - KELURAHAN KARANG JATI	
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				952.704.089		459.745.000		482.752.000		492.404.000		507.168.000		
Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	0	952.704.089	1	459.745.000	1	482.752.000	1	492.404.000	1	507.168.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	107	55		5		5		5		5			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	37	35		35		35		35		35			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2		2		2		2		2			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan				30.295.660		27.381.000		28.751.000		29.326.000		30.205.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembangunan di Kelurahan														
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	37	35	30.295.660	35	27.381.000	35	28.751.000	35	29.326.000	35	30.205.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				856.228.429		275.378.000		289.159.000		294.940.000		303.784.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	107	55	856.228.429	5	275.378.000	5	289.159.000	5	294.940.000	5	303.784.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				66.180.000		151.771.000		159.366.000		162.552.000		167.426.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2	66.180.000	2	151.771.000	2	159.366.000	2	162.552.000	2	167.426.000		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				0		5.215.000		5.476.000		5.586.000		5.753.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	0	0	1	5.215.000	1	5.476.000	1	5.586.000	1	5.753.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				751.726.665		784.411.000		823.665.000		840.134.000		865.326.000		
Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	35	33	751.726.665	33	784.411.000	33	823.665.000	33	840.134.000	33	865.326.000		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan				751.726.665		784.411.000		823.665.000		840.134.000		865.326.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Lembaga Kemasyarakatan														
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	35	33	751.726.665	33	784.411.000	33	823.665.000	33	840.134.000	33	865.326.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	23,37	24,5	15.905.055.654	25	13.800.590.000	25,5	14.494.521.000	26	14.782.752.000	26	15.226.869.000	7.01.0.00.0.00.02.0005 - KELURAHAN MEKAR SARI	
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100				100				100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				996.285.820		510.856.000		539.914.000		547.148.000		563.553.000		
Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	41	39	996.285.820	39	510.856.000	39	539.914.000	39	547.148.000	39	563.553.000		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	0				1				1			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	2				2				2			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	370	57				5				5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				41.204.000		30.510.000		32.037.000		32.678.000		33.657.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	41	39	41.204.000	39	30.510.000	39	32.037.000	39	32.678.000	39	33.657.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				881.081.820		308.757.000		324.208.000		330.691.000		340.607.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	370	57	881.081.820	5	308.757.000	5	324.208.000	5	330.691.000	5	340.607.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				74.000.000		166.374.000		178.193.000		178.193.000		183.536.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	2	74.000.000	2	166.374.000	2	178.193.000	2	178.193.000	2	183.536.000		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				0		5.215.000		5.476.000		5.586.000		5.753.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	0	0	1	5.215.000	1	5.476.000	1	5.586.000	1	5.753.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				843.331.187		880.376.000		924.433.000		942.916.000		971.190.000		
Tercapai Keaktifan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	39	37	843.331.187	37	880.376.000	37	924.433.000	37	942.916.000	37	971.190.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kemasyarakatan di Kecamatan	Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)													
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				843.331.187		880.376.000		924.433.000		942.916.000		971.190.000		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	39	37	843.331.187	37	880.376.000	37	924.433.000	37	942.916.000	37	971.190.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	23,37	24,5	15.905.055.654	25	13.800.590.000	25,5	14.494.521.000	26	14.782.752.000	26	15.226.869.000	7.01.0.00.0.00.02.0006 - KELURAHAN SUMBER REJO	
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100				100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.171.832.320		791.972.000		831.604.000		848.232.000		873.667.000		
Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	0	1.171.832.320	1	791.972.000	1	831.604.000	1	848.232.000	1	873.667.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	192	51		5		5		5		5			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam	63	61		61		61		61		61			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)													
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				43.674.000		47.721.000		50.109.000		51.111.000		52.644.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	63	61	43.674.000	61	47.721.000	61	50.109.000	61	51.111.000	61	52.644.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.010.158.320		492.343.000		516.981.000		527.318.000		543.130.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	192	51	1.010.158.320	5	492.343.000	5	516.981.000	5	527.318.000	5	543.130.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				118.000.000		246.693.000		259.038.000		264.217.000		272.140.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2	118.000.000	2	246.693.000	2	259.038.000	2	264.217.000	2	272.140.000		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				0		5.215.000		5.476.000		5.586.000		5.753.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	0	0	1	5.215.000	1	5.476.000	1	5.586.000	1	5.753.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.251.850.000		1.305.961.000		1.371.315.000		1.398.734.000		1.440.676.000		
Tercapai Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	61	59	1.251.850.000	59	1.305.961.000	59	1.371.315.000	59	1.398.734.000	59	1.440.676.000		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.251.850.000		1.305.961.000		1.371.315.000		1.398.734.000		1.440.676.000		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	61	59	1.251.850.000	59	1.305.961.000	59	1.371.315.000	59	1.398.734.000	59	1.440.676.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				918.125.557		1.453.032.000		1.528.221.000		1.556.253.000		1.602.920.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	918.125.557	100	1.453.032.000	100	1.528.221.000	100	1.556.253.000	100	1.602.920.000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				193.556.105		260.775.000		273.825.000		279.300.000		287.675.000		
Terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	16	193.556.105	14	260.775.000	14	273.825.000	14	279.300.000	14	287.675.000		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,				193.556.105		260.775.000		273.825.000		279.300.000		287.675.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	16	193.556.105	14	260.775.000	14	273.825.000	14	279.300.000	14	287.675.000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				118.739.790		125.172.000		131.436.000		134.064.000		138.084.000		
Terwujudnyas Kecamatan Ta'at Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	15	118.739.790	15	125.172.000	15	131.436.000	15	134.064.000	15	138.084.000		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				118.739.790		125.172.000		131.436.000		134.064.000		138.084.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas	0	15	118.739.790	15	125.172.000	15	131.436.000	15	134.064.000	15	138.084.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)													
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	918.125.557	100	1.453.032.000	100	1.528.221.000	100	1.556.253.000	100	1.602.920.000	7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN GUNUNG SARI ULU	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				83.107.000		117.870.000		123.768.000		126.243.000		130.029.000		
Terselenggaranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	15	83.107.000	14	117.870.000	14	123.768.000	14	126.243.000	15	130.029.000		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				83.107.000		117.870.000		123.768.000		126.243.000		130.029.000		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	15	83.107.000	14	117.870.000	14	123.768.000	14	126.243.000	15	130.029.000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan				33.000.000		70.930.000		74.480.000		75.969.000		78.247.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	33.000.000	15	70.930.000	15	74.480.000	15	75.969.000	15	78.247.000		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				33.000.000		70.930.000		74.480.000		75.969.000		78.247.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	33.000.000	15	70.930.000	15	74.480.000	15	75.969.000	15	78.247.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	918.125.557	100	1.453.032.000	100	1.528.221.000	100	1.556.253.000	100	1.602.920.000	7.01.0.00.0.00.02.0002 - KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				64.951.664		117.870.000		123.768.000		126.243.000		130.029.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	15	64.951.664	14	117.870.000	14	123.768.000	14	126.243.000	14	130.029.000		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				64.951.664		117.870.000		123.768.000		126.243.000		130.029.000		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	15	64.951.664	14	117.870.000	14	123.768.000	14	126.243.000	14	130.029.000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				32.916.216		70.930.000		74.480.000		75.969.000		78.247.000		
Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	32.916.216	15	70.930.000	15	74.480.000	15	75.969.000	15	78.247.000		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi				32.916.216		70.930.000		74.480.000		75.969.000		78.247.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	32.916.216	15	70.930.000	15	74.480.000	15	75.969.000	15	78.247.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	918.125.557	100	1.453.032.000	100	1.528.221.000	100	1.556.253.000	100	1.602.920.000	7.01.0.00.0.00.02.0003 - KELURAHAN KARANG REJO	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				64.981.077		95.965.000		100.767.000		102.782.000		105.864.000		
Terselenggaranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	15	64.981.077	14	95.965.000	14	100.767.000	14	102.782.000	14	105.864.000		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi				64.981.077		95.965.000		100.767.000		102.782.000		105.864.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Vertikal di Wilayah Kecamatan														
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	15	64.981.077	14	95.965.000	14	100.767.000	14	102.782.000	14	105.864.000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				32.959.850		70.930.000		74.480.000		75.969.000		78.247.000		
Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	32.959.850	15	70.930.000	15	74.480.000	15	75.969.000	15	78.247.000		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				32.959.850		70.930.000		74.480.000		75.969.000		78.247.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	0	14	32.959.850	15	70.930.000	15	74.480.000	15	75.969.000	15	78.247.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)													
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	918.125.557	100	1.453.032.000	100	1.528.221.000	100	1.556.253.000	100	1.602.920.000	7.01.0.00.0.00.02.0004 - KELURAHAN KARANG JATI	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				64.976.625		117.870.000		126.243.000		126.243.000		130.029.000		
Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	15	64.976.625	14	117.870.000	14	126.243.000	14	126.243.000	14	130.029.000		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				64.976.625		117.870.000		126.243.000		126.243.000		130.029.000		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	15	64.976.625	14	117.870.000	14	126.243.000	14	126.243.000	14	130.029.000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				33.000.000		70.930.000		74.480.000		75.969.000		78.247.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	33.000.000	15	70.930.000	15	74.480.000	15	75.969.000	15	78.247.000		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				33.000.000		70.930.000		74.480.000		75.969.000		78.247.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	33.000.000	15	70.930.000	15	74.480.000	15	75.969.000	15	78.247.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	918.125.557	100	1.453.032.000	100	1.528.221.000	100	1.556.253.000	100	1.602.920.000	7.01.0.00.0.00.02.0005 - KELURAHAN MEKAR SARI	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				64.999.700		95.965.000		100.767.000		102.782.000		105.864.000		
Terselenggaranya Ketentraman dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan	0	15	64.999.700	14	95.965.000	14	100.767.000	14	102.782.000	14	105.864.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)													
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				64.999.700		95.965.000		100.767.000		102.782.000		105.864.000		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	15	64.999.700	14	95.965.000	14	100.767.000	14	102.782.000	14	105.864.000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				33.000.000		70.930.000		74.480.000		75.969.000		78.247.000		
Terwujudnya Kecamatan Taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	33.000.000	15	70.930.000	15	74.480.000	15	75.969.000	15	78.247.000		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan				33.000.000		70.930.000		74.480.000		75.969.000		78.247.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	33.000.000	15	70.930.000	15	74.480.000	15	75.969.000	15	78.247.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	918.125.557	100	1.453.032.000	100	1.528.221.000	100	1.556.253.000	100	1.602.920.000	7.01.0.00.0.00.02.0006 - KELURAHAN SUMBER REJO	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				64.975.000		95.965.000		100.767.000		102.782.000		105.864.000		
Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	15	64.975.000	14	95.965.000	14	100.767.000	14	102.782.000	14	105.864.000		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				64.975.000		95.965.000		100.767.000		102.782.000		105.864.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	15	64.975.000	14	95.965.000	14	100.767.000	14	102.782.000	14	105.864.000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				32.962.530		70.930.000		74.480.000		75.969.000		78.247.000		
Terwujudnya Kecamatan Taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	32.962.530	15	70.930.000	15	74.480.000	15	75.969.000	15	78.247.000		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				32.962.530		70.930.000		74.480.000		75.969.000		78.247.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	0	14	32.962.530	15	70.930.000	15	74.480.000	15	75.969.000	15	78.247.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Negara Republik Indonesia	Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)													
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				182.173.375		229.482.000		240.966.000		245.784.000		253.154.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	182.173.375	100	229.482.000	100	240.966.000	100	245.784.000	100	253.154.000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				92.293.030		104.310.000		109.530.000		111.720.000		115.070.000		
Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	150	92.293.030	200	104.310.000	200	109.530.000	200	111.720.000	200	115.070.000		
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,				92.293.030		104.310.000		109.530.000		111.720.000		115.070.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	150	92.293.030	200	104.310.000	200	109.530.000	200	111.720.000	200	115.070.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	182.173.375	100	229.482.000	100	240.966.000	100	245.784.000	100	253.154.000	7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN GUNUNG SARI ULU	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				15.000.000		20.862.000		21.906.000		22.344.000		23.014.000		
Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	0	75	15.000.000	75	20.862.000	75	21.906.000	75	22.344.000	75	23.014.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				15.000.000		20.862.000		21.906.000		22.344.000		23.014.000		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	0	75	15.000.000	75	20.862.000	75	21.906.000	75	22.344.000	75	23.014.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	182.173.375	100	229.482.000	100	240.966.000	100	245.784.000	100	253.154.000	7.01.0.00.0.00.02.0002 - KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				15.000.000		20.862.000		21.906.000		22.344.000		23.014.000		
Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	75	15.000.000	75	20.862.000	75	21.906.000	75	22.344.000	75	23.014.000		
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,				15.000.000		20.862.000		21.906.000		22.344.000		23.014.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	75	15.000.000	75	20.862.000	75	21.906.000	75	22.344.000	75	23.014.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	182.173.375	100	229.482.000	100	240.966.000	100	245.784.000	100	253.154.000	7.01.0.00.0.00.02.0003 - KELURAHAN KARANG REJO	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				14.999.640		20.862.000		21.906.000		22.344.000		23.014.000		
Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	0	75	14.999.640	75	20.862.000	75	21.906.000	75	22.344.000	75	23.014.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				14.999.640		20.862.000		21.906.000		22.344.000		23.014.000		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	0	75	14.999.640	75	20.862.000	75	21.906.000	75	22.344.000	75	23.014.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	182.173.375	100	229.482.000	100	240.966.000	100	245.784.000	100	253.154.000	7.01.0.00.0.00.02.0004 - KELURAHAN KARANG JATI	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				14.901.265		20.862.000		21.906.000		22.344.000		23.014.000		
Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	75	14.901.265	75	20.862.000	75	21.906.000	75	22.344.000	75	23.014.000		
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,				14.901.265		20.862.000		21.906.000		22.344.000		23.014.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	75	14.901.265	75	20.862.000	75	21.906.000	75	22.344.000	75	23.014.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	182.173.375	100	229.482.000	100	240.966.000	100	245.784.000	100	253.154.000	7.01.0.00.0.00.02.0005 - KELURAHAN MEKAR SARI	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				14.994.580		20.862.000		21.906.000		22.344.000		23.014.000		
Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	0	75	14.994.580	75	20.862.000	75	21.906.000	75	22.344.000	75	23.014.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				14.994.580		20.862.000		21.906.000		22.344.000		23.014.000		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	0	75	14.994.580	75	20.862.000	75	21.906.000	75	22.344.000	75	23.014.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	182.173.375	100	229.482.000	100	240.966.000	100	245.784.000	100	253.154.000	7.01.0.00.0.00.02.0006 - KELURAHAN SUMBER REJO	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				14.984.860		20.862.000		21.906.000		22.344.000		23.014.000		
Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	75	14.984.860	75	20.862.000	75	21.906.000	75	22.344.000	75	23.014.000		
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,				14.984.860		20.862.000		21.906.000		22.344.000		23.014.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	75	14.984.860	75	20.862.000	75	21.906.000	75	22.344.000	75	23.014.000		

#### 4.3 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sebagai upaya memastikan keterpaduan antara perencanaan kewilayahan di tingkat kecamatan dengan arah pembangunan daerah, disusun daftar subkegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut memuat subkegiatan terpilih yang memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian target RPJMD.

**Tabel 4. 3 Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH</b>				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
2.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
3.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
4.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN GUNUNG SARI ULU</b>				
5.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
6.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
7.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
8.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
7.01.0.00.0.00.02.0002 - KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR				

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
9.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
10.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
11.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
12.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	



NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
			<p>7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0003 - KELURAHAN KARANG REJO</b>				
13.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	<p>7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <p>7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</p>	
14.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	<p>7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</p> <p>7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</p> <p>7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</p> <p>7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</p> <p>7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan</p> <p>7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</p> <p>7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</p>	
15.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	<p>7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p>7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</p>	

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
			7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
16.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0004 - KELURAHAN KARANG JATI</b>				
17.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
18.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
19.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
20.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0005 - KELURAHAN MEKAR SARI</b>				
21.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
22.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
23.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
24.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
			serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0006 - KELURAHAN SUMBER REJO</b>				
25.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
26.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
27.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
28.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1	Transformasi Birokrasi		Bimtek Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Bimtek Pelayanan Publik bagi Aparatur Pengembangan aplikasi Laporan RT
2	Mengatasi Stunting		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rembug Stunting, fasilitasi TPPS, Pembinaan Kader Posyandu, Sosialisasi Gizi dan Pola Asuh

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan dan Pemeliharaan Posyandu
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Kader Posyandu, Pegolahan Makanan Sehat dan Bergizi
3	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Penyediaan Bahan Logistik	Pelaksanaan Senam Gabungan, Germas dan PHBS tingkat Kecamatan
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jambore UKS Tingkat Kecamatan, Kegiatan Pokja PAUD
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (PKK)	Lomba PHBS, Lomba LBS, Lomba Posyandu, Lomba Asman Toga, Lomba Kader Penyuluh, Program Gelari Pelangi
4	Penyediaan air bersih yang sehat dan merata		Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Lomba Teknologi Tepat Guna, Sarana Panen Air Hujan
5	Pengendalian Banjir		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pemeliharaan Saluran Drainase
6	Lingkungan Hidup dan Sosial yang Sehat dan Nyaman		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Lomba CGH Tingkat Kecamatan, Pembinaan Bank Sampah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kerja Bakti Massal, Lomba Gerakan Menanam Serentak, Lomba HATINYA PKK, Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan
7	Balikpapan Kota MICE dan Wisata		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Wisata Edukasi Kampung Kangkung Kang Bejo Kel.Sumber Rejo Kampung Bungas Kelurahan Gunung Sari Ilir
8	Balikpapan Kota Inovatif dan Kreatif		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Festival Ekonomi Kreatif Balikpapan Tengah, Bazar UMKM dan Produk Ekraf di seluruh Kelurahan
			Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Teknologi Tepat Guna (Lomba, Workshop dan Pameran)



#### 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan merupakan tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan 2025–2029. Penyusunan IKU ini memperhatikan keselarasan terhadap RPJMD Kota Balikpapan dan prioritas pembangunan kewilayahan Kecamatan Balikpapan Tengah. Tabel berikut menyajikan daftar IKU Kecamatan Balikpapan Tengah beserta target kinerjanya, yang menjadi acuan dalam pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

**Tabel 4. 4**  
**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Tengah**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH									
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	90,31	90,46	90,61	90,76	90,91	91,06	91,21	
3.	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	67,67	68,84	70,07	71,3	72,53	73,76	75	

#### 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kecamatan Balikpapan Tengah disusun sebagai ukuran capaian pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2025–2029. Penyusunan IKK ini memastikan keterkaitan langsung dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan program prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut menyajikan daftar IKK beserta target tahunannya sebagai acuan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja penyelenggaraan kewilayahan di tingkat kecamatan.

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	7.01 - KECAMATAN										
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	positif	Indeks	90,31	90,46	90,61	90,76	90,91	91,06	91,21	
3.	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	positif	Nilai	67,67	68,84	70,07	71,3	72,53	73,76	75	
5.	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	positif	Indeks	86,63	87	87,25	87,5	87,75	88	88,25	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
8.	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	positif	%	23,37	24	24,5	25	25,5	26	26	
10.	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029 ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029 Urusan Kewilayahan. Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya bahwa Renstra SKPD ini disusun dengan mempertimbangkan Aspek Legalitas, Aspek Perimbangan Kewenangan Pusat dan Daerah terutama dalam era otonomi pembangunan dan aspek perencanaan strategis, dikemukakan pula Visi, Misi dan selanjutnya dirumuskan kedalam prioritas kebijakan pembangunan, serta melalui penetapan Tujuan, Strategi, Sasaran, Kebijakan, dan Program Pembangunan.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pemerintah Kota Balikpapan untuk tercapainya sasaran Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Kalimantan Timur. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah ini akan menjadi acuan dalam Penilaian Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dalam 5 tahun ke depan. Semoga upaya Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dalam 5 tahun dapat lebih terarah dan terukur.

Harus diperhatikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Balikpapan Tengah merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Balikpapan Tengah.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah serta Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan. Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan target kinerja Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan.

## AD. KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan Kota Balikpapan memasuki tahap pertama di dalam rangkaian pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045. Tahap pertama ini merupakan tahapan krusial karena menentukan agenda transformasi pembangunan untuk 5 tahun mendatang. Visi pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan, yaitu **“Balikpapan Nyaman untuk Semua 2045: Superhub Industri dan Jasa yang Maju dan Berkelanjutan dengan Semangat Madinatul Iman”**. Visi tersebut salah satunya diwujudkan melalui agenda pembangunan tahap pertama yang memiliki tema berupa “Penguatan Fondasi Transformasi: Balikpapan Kota Cerdas dan Kolaboratif.

Dalam rangka menyongsong periode pembangunan lima tahun mendatang, maka Kecamatan Balikpapan Tengah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Rencana Strategis (Renstra) merupakan perencanaan yang bersifat jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan. Rencana Strategis (Renstra) juga memuat kerangka pendanaan pembangunan daerah yang bersifat indikatif dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) dengan mempedomani RPJMD dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), serta memperhatikan tugas dan fungsi dari perangkat daerah.

Sebagai unit kerja perangkat daerah yang menjalankan sebagian kewenangan Wali Kota di tingkat wilayah, Kecamatan Balikpapan Tengah memiliki posisi strategis dalam memastikan sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dengan dinamika kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan. Oleh karena itu, penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2026–2030 dilakukan secara sistematis dan partisipatif, dengan mempertimbangkan kondisi aktual wilayah, potensi lokal, isu-isu strategis, serta hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya.

Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) kecamatan serta menjadi instrumen pengukuran kinerja aparatur kecamatan dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan di wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan seluruh jajaran Kecamatan Balikpapan Tengah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih terarah, terukur, dan akuntabel guna mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Balikpapan secara keseluruhan.

**Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)**



Rancangan Rencana Strategis (Renstra) nantinya disusun dengan memerhatikan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah yang akan direspon melalui rumusan strategi, arah kebijakan dan program prioritas Perangkat Daerah. Nantinya, substansi dari ketetapan-ketetapan yang telah termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) akan menjadi acuan dasar bagi Kecamatan Balikpapan Tengah dalam merumuskan kebijakan perencanaan strategis instansi daerah melalui rencana strategis perangkat daerah. Oleh karenanya, Rencana Strategis (Renstra) memiliki peran yang penting dalam proses perencanaan pembangunan perangkat daerah secara umum.

**1.2 Dasar Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tahun 2025-2029 memiliki dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat



- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73),
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

- Nomor 1419);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  23. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 20);
  24. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 54);
  25. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2045.
  26. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2025- 2029, yaitu untuk memberikan arahan perencanaan dan pelaksanaan strategi pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Balikpapan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Tersedianya dokumen yang memuat gambaran kinerja pembangunan dan kondisi keuangan daerah yang aktual; l;
2. Tersedianya dokumen yang memuat pemetaan masalah berbasis capaian kinerja dan rumusan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah;
3. Sebagai dasar perumusan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan selama lima tahun kedepan;
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);
5. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergi dan terpadu antara perencanaan pembangunan kota Balikpapan, serta perencanaan sektoral;
6. Sebagai tolok ukur untuk penilaian keberhasilan Kecamatan Balikpapan Tengah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel;
7. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan.

**1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

**BAB I        PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas tentang isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

**BAB II        GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN  
BALIKPAPAN TENGAH**

Menjelaskan gambaran umum tentang peran (tugas dan fungsi) sebagai perngakt daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahanan daerah daam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

**BAB III       PERMASALAHAN       DAN       ISU       STRATEGIS  
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH**

Menjelaskan gambaran tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah, telaahan visi, misi dan program Wali Kota terpilih, telaahan RPJMD Kota Balikpapan, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

**BAB IV        TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Balikpapan Tengah.

**BAB V         STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN  
BALIKPAPAN TENGAH**

Memuat tentang strategi dan kebijakan pelaksanaan kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah.

**BAB VI        RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB  
KEGIATAN SERTA PENDANAAN KECAMATAN  
BALIKPAPAN TENGAH**

Memuat tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan pelaksanaan kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah selama 5 (lima) Tahun.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH**

Menyajikan indikator kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Balikpapan.

## **BAB VIII PENUTUP**

Memuat tentang kesimpulan Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2025-2029.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Sub bab ini menguraikan gambaran umum terkait tugas, fungsi Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan dijelaskan secara rinci dijabarkan sebagai berikut.

##### **2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Kecamatan Balikpapan Tengah merupakan salah satu perangkat daerah di kota Balikpapan yang mempunyai wilayah kerja di kecamatan. Sebagai unsur Perangkat daerah ah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Kecamatan Balikpapan Tengah dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Balikpapan Tengah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Tugas dan fungsi Kecamatan Kecamatan Balikpapan Tengah mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.

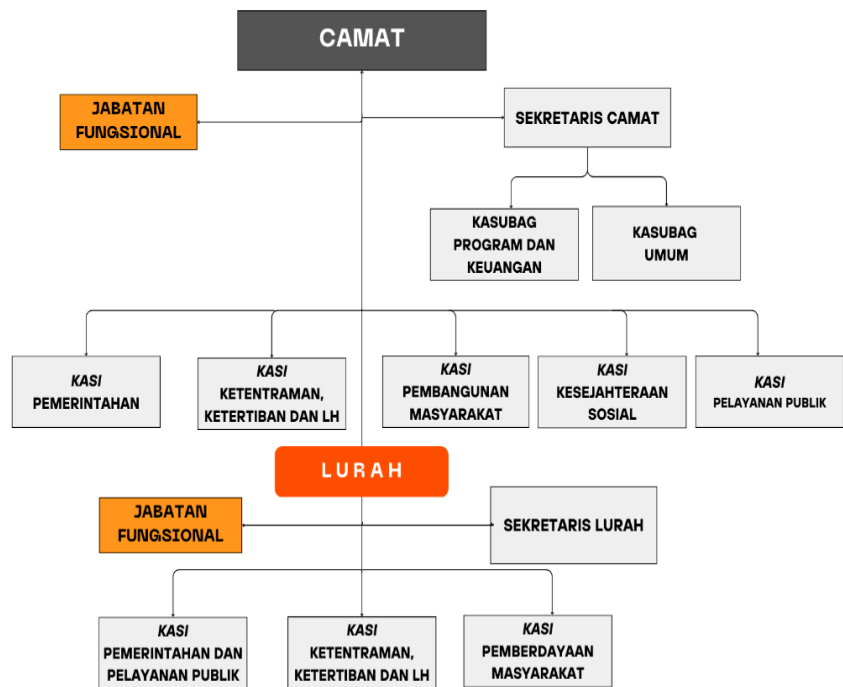
Camat menyelenggarakan tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
6. Pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;

8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah kecamatan;
10. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dibidang administrasi Pertanahan dan kependudukan di wilayah kecamatan;
11. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
12. Pelaksanaan Monitoring evaluasi pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan atau atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kecamatan Balikpapan Tengah berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

**Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan**



Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Walikota, **Camat** menangani sebagian urusan otonomi daerah, Camat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjasi ruang lingkup tugasnya;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
10. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahandan kependudukan di wilayah Kecamatan;
11. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.yah Kecamatan;

Dalam melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian. Camat dibantu oleh **Sekretaris** membawahi Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan serta Kasubag Umum. Sekretraris melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Pengoordinasian penyusunan usulan program dan kegiatan;
2. Pengoordinasian penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah;
3. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
4. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
5. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
6. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
7. Pengelolaan anggaran Kecamatan dan penerimaan administrasi;
8. Pelaksanaan administrasi keuangan;
9. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dan;
11. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok menyusun perencanaan program dan pengelolaan administrasi keuangan, **Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan** bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas dan fungsisebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah meliputi:
  - a. Rencana Strategis;
  - b. Rencana Kerja;
  - c. Rencana Kerja Tahunan;
  - d. Penetapan Kinerja; dan
  - e. Laporan Kinerja.
2. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
3. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
4. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
5. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan.
6. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
7. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;



8. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
9. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
10. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
11. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
12. Menyusun laporan keuangan Kecamatan;
13. Melaksanakan monitoring evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas **Kasubag Umum** bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
2. Mengelola tertib administrasi umum dan ketatausahaan;
3. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
4. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
5. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
6. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
7. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventaris barang;
8. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
9. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
10. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
11. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
12. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
13. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
14. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan;
15. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan **Kasi Pemerintahan** yang bertanggung jawab kepada Camat untuk :

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan;
2. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah Kecamatan;
3. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kependudukan di wilayah kecamatan
4. Memfasilitasi permasalahan pertanahan di wilayah Kecamatan;
5. Melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan;
6. Memfasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan;
7. Melaksanakan Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan
8. Menyusun dokumen monografi di kecamatan;
9. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan
11. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketentraman, ketertiban dan Lingkungan Hidup, **Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup** bertanggung jawab kepada Camat untuk:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban, dan lingkungan hidup;
2. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketentraman, ketertiban dan kemasyarakatan;
3. Melaksanakan pengawasan rumah sewa/pondokan;
4. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan rumah sewa/pondokan;
5. Melaksanakan pengoordinasian pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin;
6. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan

kegiatan, lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah kecamatan;

7. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan;
8. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
9. Memfasilitasi permasalahan ketentraman, ketertiban, dan lingkungan hidup;
10. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketentraman dan ketertiban wilayah serta antisipasi bencana alam;
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Pembangunan, **Kasi Pembangunan** bertanggung jawab kepada Camat untuk:

1. Menyusun program dan kegiatan di bidang pembangunan masyarakat;
2. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan;
3. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan;
4. Memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian;
5. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
6. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
7. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah;
8. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong-royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;

9. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program pembangunan kelurahan dan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
10. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Dalam melaksanakan tugas **Kasi Kesejahteraan Sosial** bertanggung jawab kepada Camat untuk:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial;
2. Memfasilitasi penanggulangan bencana, pasca bencana dan pengungsi serta masalah sosial
3. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
4. Melaksanakan fasilitas pembinaan dan pengawasan kegiatan program, kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga bencana;
5. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama;
6. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
7. Melaksanakan fasilitas pembinaan program usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan.
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas **Kasi Pelayanan Publik** bertanggung jawab kepada Camat untuk:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pelayanan publik;
2. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
3. Menyusun Standar Operasional Prosedur;
4. Menyusun Standar Pelayanan
5. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
6. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;

7. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
8. Mengelola layanan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan;
9. Memfasilitasi dan menindak lanjuti hasil pengaduan dan pemberian informasi;
10. Mengelola layanan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan;
11. Memfasilitasi dan menindak lanjuti hasil pengaduan warga terhadap pelayanan;
12. Melaksanakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat
13. Melaksanakan tatakelola pelayanan publik
14. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
15. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertahanan, kependudukan, pembangunan, ketentraman, ketertiban, lingkungan hidup, dan kesejahteraan sosial yang di koordinasikan dengan seksi terkait;
16. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pada kelurahan;
17. Melaksanakan pengamanan *hardwer* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
18. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
19. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugas nya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan, maka Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kelurahan. Kelurahan berkedudukan dibawah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

**Lurah** adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan

pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Adapun tugas seorang Lurah yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
3. Penyelenggaraan dan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
6. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
7. Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan Pembangunan dan kemasyarakatan;
8. Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Sekretariat** Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
  - a. Rencana strategis;
  - b. Rencana kerja;
  - c. Rencana kerja tahunan;
  - d. Penetapan kinerja; dan
  - e. Laporan kinerja;
2. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
3. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan Kegiatan;
4. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
5. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
7. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
8. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;

9. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
10. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
11. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
12. Menyusun laporan keuangan kelurahan;
13. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
14. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
15. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
16. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
17. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
18. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
19. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik daerah;
20. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
21. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
22. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
23. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
24. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
25. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
26. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
27. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan publik
2. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
4. Melaksanakan administrasi pertahanan

5. Melaksanakan tertib administrasi dan penandatanganan kependudukan;
6. Melaksanakan pembinaan rukun tetangga
7. Menyusun monografi kelurahan;
8. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
9. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
10. Menyusun standar operasional dan prosedur pelayanan dan menyusun standar pelayanan lingkup Kelurahan;
11. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan
12. Menyusun tatalaksana dan tatakelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi pelayanan publik;
13. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
14. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan;
15. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
16. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketentraman dan ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
17. Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
18. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
19. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan;
20. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup**

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
2. Melaksanakan layanan bidang ketentraman dan ketertiban serta layanan surat pengantar izin pertunjukan dan keramaian;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;



4. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan;
5. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;
6. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
7. Memfasilitasi permasalahan di bidang ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
8. Melaksanakan koordinasi ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup dengan instansi terkait, lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan rukun tetangga;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan;
10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Pemberdayaan Masyarakat** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
2. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan;
3. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadaya masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
5. Melaksanakan pembinaan penataan penataan pembangunan permukiman penduduk;
6. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kelurahan;
7. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
8. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama;
9. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
10. Melaksanakan fasilitasi pendataan masyarakat rentan masalah sosial dan keluarga miskin;
11. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial;

12. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah dibidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
13. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kegiatan/program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
14. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha kesejahteraan rakyat;
15. Melaksanakan fasilitasi penanggulangan korban bencana;
16. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
17. Melaksanakan penyusunan profil kelurahan;
18. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
19. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai bidang tugasnya.

**Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kelurahan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggungjawab kepada Lurah dan secara operasional dikoordinasikan dan bertanggung jawab kepada kepala seksi sesuai pembidangnya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta uraian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.2 Sumber Daya**

#### **2.1.2.1 Keadaan Geografi dan Demografi**

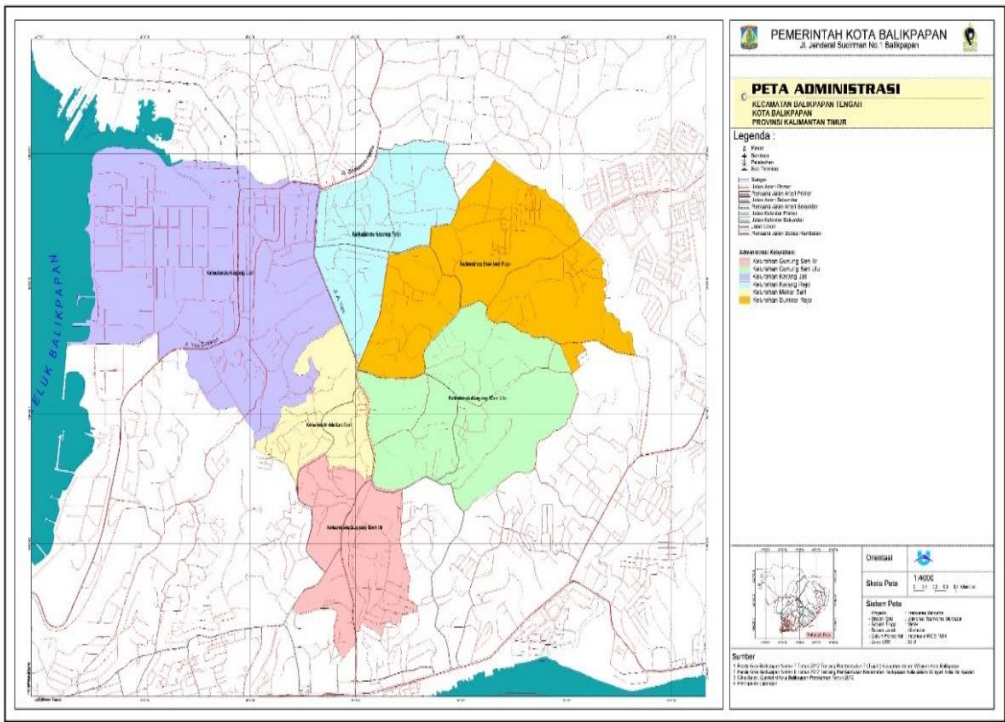
Berdasarkan data BPS Kota Balikpapan (2024), secara geografis, Kecamatan Balikpapan Tengah memiliki luas wilayah 1.127 Ha dengan letak dari permukaan laut sekitar 0-25 meter. Jarak dari Balai kota Kota Balikpapan ± 2,1 Km yang di hubungkan oleh jalan Kota dengan bates batas Wilayah Kecamatan sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Barat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Selatan;
- Sebelah Tengah berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan

Tengah; dan

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Selatan.

Gambar 2. 2 Peta Administrasi Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan



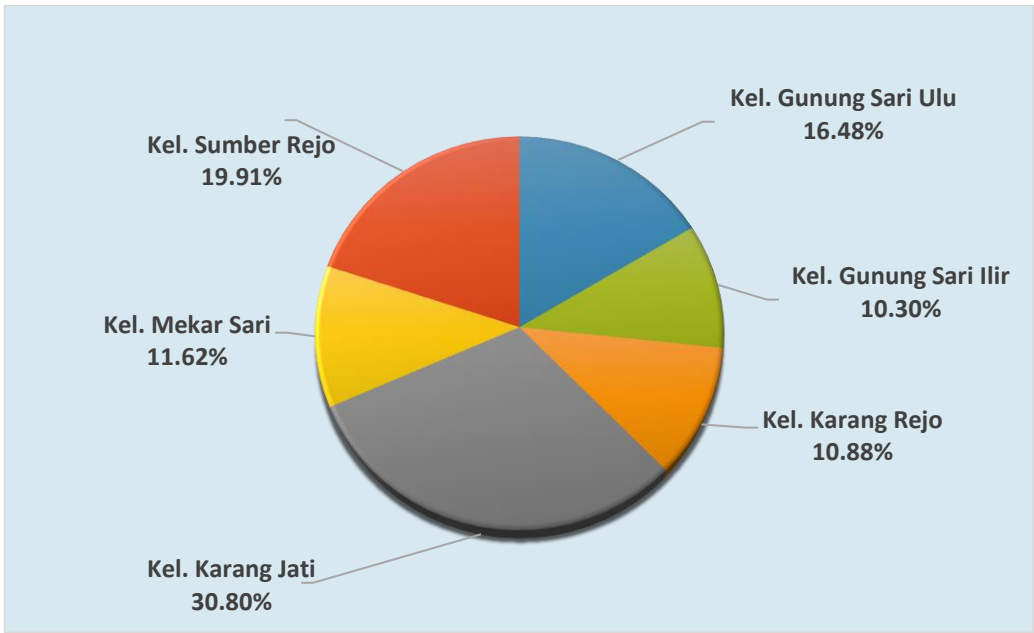
Sumber: Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan

Dari segi cakupan, Kecamatan Balikpapan Tengah memiliki 6 (enam) Kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Gunung Sari Ulu dengan luas 182 Ha atau 1,82 km<sup>2</sup>
2. Kelurahan Gunung Sari Ilir dengan luas 114 Ha atau 1,14

- km<sup>3</sup>
- 3. Kelurahan Karang Rejo dengan luas 121 Ha atau 1,21 km<sup>2</sup>
  - 4. Kelurahan Karang Jati dengan luas 342 Ha atau 3,41 km<sup>2</sup>
  - 5. Kelurahan Mekar Sari dengan luas 129 Ha atau 1,29 km<sup>3</sup> dan
  - 6. Kelurahan Sumber Rejo dengan luas 221 Ha atau 2,21 km<sup>2</sup>

**Grafik 2. 1 Persentase Luas Per Kelurahan di Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan**



Sumber: Olah data, 2024

Potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Balikpapan Tengah dari aspek demografi penduduk Kecamatan Balikpapan Tengah berjumlah +/- 105.749 jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 52.867 Jiwa dan Perempuan berjumlah 51.882 Jiwa. Strata pendidikan penduduk Kecamatan Balikpapan Tengah terdiri dari pendidikan SD 8.980 Jiwa, Pendidikan SLTP 13.557 Jiwa, Pendidikan setingkat SLTA 37.085 Jiwa dan setingkat perguruan tinggi 10.481 Jiwa.

**Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelurahan dan jenis Kelamin**

Desa/Kelurahan	Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Gunung Sari Ilir	10,744	10,454	21,198
Gunung Sari Ulu	7,818	7,470	15,288
Mekar Sari	6,541	6,344	12,885
Karang Rejo	12,056	11,762	23,818
Sumber Rejo	10,801	10,236	21,037
Karang Jati	5,907	5,616	11,523
Balikpapan Tengah	53,867	51,882	105,749

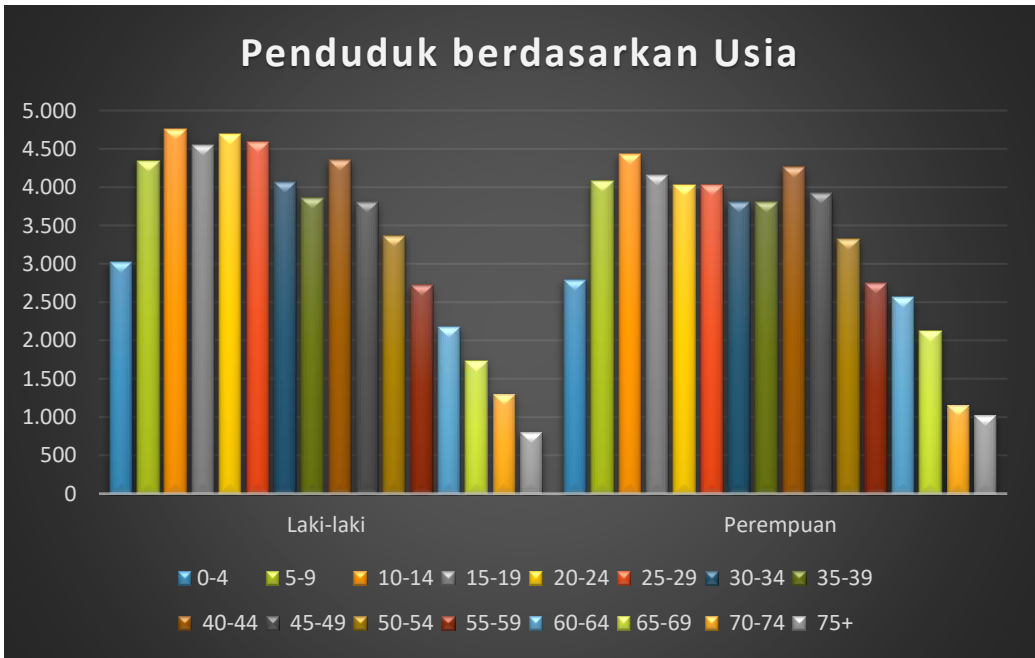
Sumber :BPS 2024

Tabel 2. 2 Jumlah Rukun Tetangga dan Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan Kelurahan

Desa/Kelurahan	Rukun Tetangga (RT)	Kepala Keluarga (KK)
(1)	(2)	(3)
Gunung Sari Ilir	69	7,827
Gunung Sari Ulu	39	5,446
Mekar Sari	35	4,724
Karang Rejo	87	8,523
Sumber Rejo	57	7,357
Karang Jati	35	4,117
Balikpapan Tengah	322	37,994

Sumber :BPS 2024

Grafik 2. 2 Penduduk Kecamatan Balikpapan Tengah berdasarkan Usia



Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025 Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Jakarta

Komposisi penduduk di Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan berdasarkan usia dan jenis kelamin pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk relatif stabil antara kelompok usia produktif maupun non produktif. Komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin di Kecamatan Balikpapan tengah Kota Balikpapan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni sebesar 70,33 persen dengan rincian 35,89 persen di antaranya laki-laki dan 34,45 persen lainnya adalah perempuan. Penduduk yang berada dalam usia non-produktif didominasi oleh kelompok usia 0-14 tahun yang mencapai 22,02 persen, sedangkan kelompok usia non-produktif lansia hanya 7,65 persen. Usia produktif dianggap sebagai masa seorang individu memasuki usia kerja, yakni 15-64 tahun. Kelompok usia produktif yang lebih banyak dibandingkan non produktif menunjukkan bahwa Kota Balikpapan sedang dalam fase bonus demografi, terutama ketika mempertimbangkan besaran rasio ketergantungan yang dimiliki. Data pada piramida penduduk di atas menunjukkan bahwa Kota Balikpapan memiliki rasio ketergantungan sebesar 43,28 persen. Rasio ketergantungan yang masih berada di bawah angka 45 persen menunjukkan bahwa Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan mengalami bonus demografi pada tahun 2025. Bonus demografi mengindikasikan adanya potensi sumber daya manusia yang dapat dioptimalkan untuk pembangunan di Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, tetapi bonus demografi juga

perlu dikelola dengan baik karena akan memengaruhi kondisi di Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan ke depannya.

**2.1.2.2 Peta Rawan Bencana Kecamatan Balikpapan Tengah**

Peta rawan bencana bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi geografis dan tingkat kerentanan di Wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah. Peta rapan bencana Sebagai mana tabel berikut:

**Tabel 2. 3 Peta Rawan Bencana Kecamatan Balikpapan Tengah**

N O	JENIS BENCA NA	LOKASI RAWAN BENCANA	
1.	Banjir	Kelurahan Gunung Sari Ulu	: RT. 19,20 dan 30
		Kelurahan Gunung Sari Ilir	: RT. 1,3,4,28 dan 32
		Kelurahan Karang Rejo	: RT. 1,3,4,5,6,7,8,61,62,63,64,65,dan 66
		Kelurahan Karang Jati	: NIHIL
		Kelurahan Mekar Sari	: RT. 5, 21, dan 24
		Kelurahan Sumber Rejo	: RT. 7,8,16,18,28,40,45,48,58,59
2.	Longsor	Kelurahan Gunung Sari Ulu	: RT.5,8,12,14,15,18,19,20,21,23,24,25,29,30,32,35 dan 39
		Kelurahan Gunung Sari Ilir	: RT.2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,2730,37,49,50,60,62,63 dan 64
		Kelurahan Karang Rejo	: RT. 9,10,13,23, 24 dan 25
		Kelurahan Karang Jati	: RT. 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,18,19 dan 20
		Kelurahan Mekar Sari	: RT. 1, 2, 3, 6, 13, 14, 16, 19, 26, 33, 36, dan 37
		Kelurahan Sumber Rejo	: RT.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,47,56,57 dan 58
3.	Kebakaran	Kelurahan Gunung Sari Ulu	: RT. 30
		Kelurahan Gunung Sari Ilir	: RT. 11 dan 25
		Kelurahan Karang Rejo	: RT. 34,445,47,50,51,52,57,58,59 dan 60
		Kelurahan Karang Jati	: RT. 1 sd 34
		Kelurahan Mekar Sari	: RT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 26, dan 37

N O	JENIS BENCA NA	LOKASI RAWAN BENCANA		
		Kelurahan Sumber Rejo	:	RT. 1 sd 59

**2.1.2.3 Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Kecamatan Balikpapan Tengah sebagai Unit Pelayanan Publik yang berkualitas baik dan akuntabel.

Berdasarkan analisis beban kerja, cakupan wilayah yang sangatluas dan perlunya koordinasi yang intens Kecamatan Balikpapan Tengah, SDM yang ada belum memenuhi dari kebutuhan yang seharusnya. Komposisi Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah berdasarkan beberapa kriteria pada tahun 2025 adalah sebagaimana tertera pada Tabel-Tabel berikut.

**Tabel 2. 4**  
**Rekapitulasi Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kecamatan Balikpapan Tengah		8	14	22
1	Camat	1	0	1
2	Sekretaris Camat	0	1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan	1	0	1
4	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1	0	1
5	Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat	0	1	1
6	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	0	1	1
7	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	0	1	1
8	Kepala Sub Bagian Umum	0	1	1



No.	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
9	Pelaksana	5	9	14
<b>Kelurahan Gunung Sari Ulu</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
1	Lurah	1	0	1
2	Sekretaris Lurah	0	1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	0	1	1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1	0	1
6	Pelaksana	3	2	5
<b>Kelurahan Gunung Sari Ilir</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
1	Lurah	1	0	1
2	Sekretaris Lurah	0	1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	0	1	1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1	0	1
6	Pelaksana	2	2	4
<b>Kelurahan Karang Rejo</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
1	Lurah	1	0	1
2	Sekretaris Lurah	1	0	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	0	1	1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	0	0	0
6	Pelaksana	3	2	5
<b>Kelurahan Karang jati</b>		<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
1	Lurah	1	0	1

No.	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2	Sekretaris Lurah	1	0	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	0	1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1	0	1
6	Pelaksana	3	1	4
<b>Kelurahan Mekar Sari</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
1	Lurah	0	1	1
2	Sekretaris Lurah	0	0	0
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	0	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	0	1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1	0	1
6	Pelaksana	1	3	4
<b>Kelurahan Sumber Rejo</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
1	Lurah	1	0	1
2	Sekretaris Lurah	0	0	0
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	0	0	0
6	Pelaksana	3	2	5
<b>Total</b>		<b>37</b>	<b>37</b>	<b>74</b>

Sumber: Bazeting Kecamatan Balikpapan Tengah Bulan April 2025

**Tabel 2. 5**  
**Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan**

No	Unit Kerja	Golongan			
PEGAWAI NEGERI SIPIL		IV	III	II	I
1	Kecamatan Balikpapan Tengah	2	13	5	0
2	Kelurahan Gunung Sari Ulu	0	6	1	0
3	Kelurahan Gunung Sari Ilir	0	6	0	0
4	Kelurahan Karang Rejo	0	5	1	0
5	Kelurahan Karang Jati	0	6	1	0
6	Kelurahan Mekar Sari	0	5	0	0
7	Kelurahan Sumber Rejo	0	4	0	0
JUMLAH PNS		2	45	8	0
PPPK		IX	VIII	V	I
1	Kecamatan Balikpapan Tengah	1	0	1	0
2	Kelurahan Gunung Sari Ulu	0	0	2	1
3	Kelurahan Gunung Sari Ilir	1	0	2	0
4	Kelurahan Karang Rejo	0	0	2	1
5	Kelurahan Karang Jati	1	0	1	0
6	Kelurahan Mekar Sari	0	1	2	0
7	Kelurahan Sumber Rejo	1	0	2	0
JUMLAH PPPK		4	1	12	2

Sumber: Data diolah

**Tabel 2. 6**  
**Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Unit Kerja	Pendidikan								
		S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD
1	Kecamatan Balikpapan Tengah	2	9	0	1	1	0	9	0	0
2	Kelurahan Gunung Sari Ulu	0	5	0	0	0	0	3	1	1
3	Kelurahan Gunung Sari Ilir	0	4	1	1	0	0	3	0	0
4	Kelurahan Karang Rejo	0	4	1	0	0	0	3	0	1
5	Kelurahan Karang Jati	0	5	0	1	0	0	3	0	0
6	Kelurahan Mekar Sari	0	1	3	1	0	1	2	0	0
7	Kelurahan Sumber Rejo	0	3	0	0	0	0	4	0	0
TOTAL PEGAWAI		2	31	5	4	1	1	27	1	2

Sumber: Data diolah

**2.1.2.4 Sarana dan Prasarana**

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kecamatan Balikpapan Tengah dibutuhkan adanya peralatan/

perlengkapan kerja atau aset. Secara keseluruhan jumlah peralatan/ perlengkapan kerja atau aset baik berupa barang bergerak yang dikelola Kecamatan Balikpapan Tengah sebesar Rp. 5.494.701.141,00 dirasa masih

belum memadai, dibandingkan dengan cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran dan peralatan yang masih memerlukan peningkatan demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat. Jumlah dan keadaan sarana dan prasarana tertuang dalam tabel berikut :

**Tabel 2. 7 Daftar Aset/ Barang Milik Daerah Kecamatan Balikpapan Tengah**

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Gedung Bangunan	10	Baik
2	Aula	5	Baik
3	Rumah Jabatan	4	Baik
4	Taman Bermain	1	Baik
5	Station Wagon	7	Baik
6	Jeep	1	Baik
7	Pick Up	1	Baik
8	Mobil Jenazah	1	Baik
9	Sepeda Motor	29	Baik
10	Kendaraan roda 3/ Alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	2	Baik
11	A.C. Split/Window	63	Baik
12	APAR/Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	5	Baik
13	Alat Kantor Lainnya	7	Baik
14	alat kesehatan kerja lainnya (dst)	1	Baik
15	Alat Pengasapan	1	Baik
16	Alat Penghancur Kertas	2	Baik
17	alat pengolahan tanah dan tanaman lainnya (dst)	1	Baik
18	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)	1	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
19	Alat Rumah Tangga Lain-lain	25	Baik
20	Brandkas/Peti Uang/Cash Box/Coin Box	8	Baik
21	Buffet Kaca/Rak-Rak Penyimpan/Besi/Kayu	9	Baik
22	Camera Electronic/Lensa Kamera/Tustel/Handy Cam	11	Baik
23	CCTV - Camera Control Television System	7	Baik
24	CPU (Peralatan Mainframe/Peralatan Personal Komputer)	12	Baik
25	Dispenser	10	Baik
26	Facsimile	2	Baik
27	Filing Cabinet Besi	29	Baik
28	Generator/Generator Set(Lab Scale)/Grating Generator Unit	6	Baik
29	Gergaji Chain Saw/Mesin Blower Listrik / Mekanik	4	Baik
30	Global Positioning System	1	Baik
31	Gordyin/Kray/Vertikal Blind	7	Baik
32	Handy Talky (HT)	2	Baik
33	Karpet	1	Baik
34	Kipas Angin	11	Baik
35	Kursi Kerja/rapat/Pelayanan/Sofa	136	Baik
36	Lap Top/Note Book	27	Baik
37	Lemari Es	9	Baik
38	Lemari Besi/Metal/Kaca/Kayu/Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis/Perpustakaan	48	Baik
39	Loudspeaker	5	Baik
40	Meja kerja/Rapat/pelayanan/komputer/makan/sofa	94	Baik
41	Mesin Absensi	12	Baik
42	Mesin Cuci	1	Baik
43	Mesin Fotocopy Folio	7	Baik
44	Mesin Ketik Listrik/Manual Portable/ Standard	5	Baik
45	Mesin Pemotong Rumput	21	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
46	Mesin Penghalus	1	Baik
47	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner/Vacum Pump	2	Baik
48	Meubeleur lainnya	10	Baik
49	Microphone/Wireless MIC	6	Baik
50	Monitor/Screen	8	Baik
51	Motuary Refrigerator	1	Baik
52	Overhead Projector/Layar Film/Projector	3	Baik
53	P.C Unit/Personal Komputer/Computer Compatible/Komputer Jaringan lainnya/Distiling Apparatus	97	Baik
54	Papan Visual>Nama Instansi/Pengumuman	11	Baik
55	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2	Baik
56	Peralatan Minikomputer lainnya	1	Baik
57	peralatan studio audio lainnya (dst)	7	Baik
58	Pompa Air	1	Baik
59	Portable Generating Set	5	Baik
60	Power Amplifier	1	Baik
61	Printer/Line Printer (Peralatan Personal Komputer)	68	Baik
62	recorder display lainnya (dst)	2	Baik
63	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	12	Baik
64	Sound System	7	Baik
65	Stabilizer	1	Baik
66	Tabung Gas	1	Baik
67	Tangga Aluminium	3	Baik
68	Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran)	1	Baik
69	Telephone (PABX)	1	Baik
70	Televisi/TV Monitor	19	Baik
71	Tempat Air Suling	1	Baik
72	Tempat Tidur Besi/Kayu	6	Baik
73	Tenda	1	Baik
74	Termometer Standar	7	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
75	Uninterruptible Power Supply (UPS)	9	Baik
76	Unit Tranceiver VHF Portable	1	Baik
77	White Board	2	Baik
78	Wireless/Wireless Amplifier	9	Baik

**2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah**

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga ataupun memberikan pelayanan kepada warga yang memenuhi kewajibannya terhadap Pemerintah. Pelayanan di Kecamatan Balikpapan Tengah adalah jenis pelayanan administrasi dengan pola pelayanan teknis fungsional dan pola pelayanan elektronik. Pola Pelayanan Kecamatan menggunakan suatu sistem terpadu yang disebut Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan yang berproses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui satu loket pelayanan, warga cukup menyerahkan berkas ke petugas meja/loket pelayanan, duduk menunggu sejenak, kemudian dipanggil untuk menerima dokumen yang sudah selesai

Layanan yang tersedia di Kecamatan Balikpapan Tengah adalah :

- Layanan Penerbitan Izin Membuka Tanah Negara < 5.000 M2
- Layanan Pelayanan Penerbitan Perpanjangan Izin Membuka Tanah Negara
- Layanan Pelayanan Surat Pernyataan Ahli Waris
- Layanan Pelayanan Surat Kuasa Ahli Waris
- Layanan Pelayanan Dispensasi Nikah
- Layanan Pelayanan Surat Keterangan
- Layanan Pelayanan Perubahan Kartu Keluarga
- Layanan Pelayanan Peminjaman Mobil Jenazah

**2.1.3.1 Pencapaian Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah**

Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan tertuang dalam Renstra,

Berdasarkan Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang diukur melalui 3 (tiga) indikator sasaran. Berdasarkan pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagaimana tabel berikut:



**Tabel 2. 8**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				N/A	N/A	80,85	81	81,15	N/A	N/A	80,75	86,63	90,31	N/A	N/A	99,88	106,95	111,29
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				N/A	N/A	70	70,15	70,68	N/A	N/A	69,97	65,56	67,67	N/A	N/A	99,96	93,46	95,74

Dari tabel 2.8 diatas dapat disimpulkan bahwa target RENSTRA pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 - 2025 dapat tercapai, dengan kata lain kinerja Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Balikpapan Tengah memiliki kategori Baik. Bahkan untuk beberapa kegiatan tertentu capaian kinerjanya sesuai target kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan capaian Kinerja pada periode RENTRA sebelumnya ini dapat dijadikan acuan dalam menentukan target pada RENSTRA selanjutnya dan dapat dijadikan pendorong untuk kinerja selanjutnya agar menjadi lebih baik.

#### **2.1.3.2 Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Balikpapan Tengah**

Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Wali Kota selaku kepala Daerah terpilih yang ercantum dokumen perencanaan RPJMD, juga dapat tergambar melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan sebagaimana dapat terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 9**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Balikpapan Tengah**  
**Kota Balikpapan**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGA RAN	REALISA SI
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.890.617.184	15.268.849.346	15.959.606.800	23.040.147.724	N/A	14.808.702.105	13.089.927.715	11.422.278.513	19.575.295.883	N/A	99%	86%	72%	85%	16%	-3%
Program Penyelenggara n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	3.115.055.250	739.255.600	355.988.900	278.181.900	N/A	3.077.758.988	691.389.800	349.035.300	271.704.700	N/A	99%	94%	98%	98%	-59%	-58%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.940.440.474	4.853.656.190	12.773.942.150	17.493.336.030	N/A	1.870.816.675	4.802.905.096	14.658.307.622	17.144.313.423	N/A	96%	99%	115%	98%	120%	120%
Program Koordinasi Dan Ketertiban Umum	47.905.000	261.884.000	898.351.700	840.153.200	N/A	47.906.000	256.970.700	865.191.225	826.587.400	N/A	100%	98%	96%	98%	138%	136%
JUMLAH	19.994.017.908	21.123.645.136	29.987.889.550	41.651.818.854	-	19.805.183.768	18.841.193.311	27.294.812.660	37.817.901.406		99%	94%	95%	95%	54%	48,70%

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan**

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan pada dasarnya mencakup semua pihak yang menjadi penerima manfaat dari fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, Berikut pembagian Kelompok Sasaran berdasarkan Jenis Layanan Kecamatan Balikpapan Tengah :

##### **1. Warga & Penduduk**

- Penduduk tetap (pemilik KTP Kota Balikpapan, domisili di Balikpapan Tengah)
- Penduduk non-permanen (pendatang, pekerja kontrak, mahasiswa, dll.)
- Penduduk rentan: lansia, penyandang disabilitas, anak yatim/piatu, korban bencana

Jenis layanan terkait:

Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KK, akta lahir/kematian), perizinan, rekomendasi, surat keterangan, layanan pengaduan.

##### **2. Kelompok Usaha & Ekonomi**

- UMKM lokal (pedagang pasar, warung, home industry)
- Pelaku usaha formal (perusahaan, koperasi)
- Pelaku ekonomi kreatif (kuliner, kerajinan, jasa digital)

Jenis layanan terkait:

Rekomendasi usaha, fasilitasi perizinan OSS/PBG, pembinaan UMKM, pelatihan kewirausahaan.

##### **3. Komunitas & Organisasi Masyarakat**

- RT/RW dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)
- Karang Taruna, PKK, Posyandu
- Organisasi keagamaan, adat, sosial
- Organisasi kepemudaan (Pramuka, komunitas hobi, klub olahraga)

Jenis layanan terkait:

Fasilitasi kegiatan sosial-budaya, dukungan sarana/prasarana, pemberdayaan masyarakat, penanganan masalah sosial.

##### **4. Kelompok Rentan & Perlindungan Khusus**

- Anak-anak (program ramah anak, perlindungan anak)
- Perempuan (program pemberdayaan dan perlindungan perempuan)
- Lansia
- Masyarakat miskin dan terdampak bencana

Jenis layanan terkait:

Bantuan sosial, perlindungan terpadu berbasis masyarakat (PPATBM), penanganan KDRT, pendampingan korban bencana.

#### 5. Institusi Pendidikan & Kesehatan

- Sekolah dan madrasah di wilayah kecamatan
- Puskesmas, posyandu, klinik
- Perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berlokasi di wilayah kecamatan

Jenis layanan terkait:

Pembinaan sekolah, kegiatan kesehatan masyarakat, vaksinasi, sosialisasi pencegahan penyakit.

#### 6. Aparatur & Mitra Kerja Pemerintahan

- ASN dan staf kelurahan
- Polsek, Koramil, dan instansi vertikal lainnya
- DP3AKB, Disdikbud, Dinkes, Disperindag, dan OPD terkait
- BUMN/BUMD dan CSR perusahaan di wilayah

Jenis layanan terkait:

Koordinasi program pembangunan, penegakan peraturan, pengawasan lingkungan dan ketertiban.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah**

### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah**

Permasalahan pembangunan daerah di Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan merupakan upaya untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan pembangunan yang perlu direspons oleh Pemerintah Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan selama lima tahun mendatang.

**Tabel 2. 10**  
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah
(1)	(2)	(3)
Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat serta Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan Balikpapan Tengah	Belum optimalnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	-Minimnya Sarpas Pelayanan -Minimnya Kuantitas dan Kualitas SDM  -Belum terbangunnya integrasi pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan
	Masih rendahnya keterlibatan komponen masyarakat dalam pembangunan	Minimnya Akses, kurangnya sosialisasi tentang pentingnya partisipasi Masyarakat dalam pembangunan
	Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif	Minimnya Akses, kurangnya sosialisasi tentang pentingnya partisipasi Masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif
	Masih tingginya kasus Pencemaran Lingkungan	-Pengelolaan sampah yang kurang maksimal -Pelanggaran Site Plant -Pelanggaran Tata Ruang -Warga Membuang Sampah -Limbah Industri
	Kurang ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum	-Keterbatasan Lahan -Keterbatasan Anggaran -Perencanaan kegiatan yag kurang baik
	Meningkatnya Jumlah Penduduk dan mobilitas Masyarakat	Tuntutan pelayanan yang cepat dan responsif terhadap tingginya mobilitas warga

### **2.2.2 Isu Strategis**

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renstra sebelumnya, prediksi permasalahan dan tantangan 5 (lima) tahun ke depan, isu tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Kecamatan Balikpapan Tengah dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, sebagai berikut :

**Tabel 2. 11 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah**

No.	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	Belum optimalnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Masih adanya pelanggaran terhadap peraturan pemerintah	Perubahan Iklim, Urbanisasi/Mobilitas Masyarakat Internalisasional	Pembangunan Ibukota Negara Nusantara (IKN)	Isu Strategis dalam RPJMD Kota Balikpapan : Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Tingkat Kecamatan Balikpapan Tengah
		Masih rendahnya keterlibatan komponen masyarakat dalam pembangunan					
		Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif					
		Masih tingginya kasus Pencemaran Lingkungan					
		Kurang ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum					
		Meningkatnya Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat					
		Meningkatnya Jumlah Penduduk dan Mobilitas Masyarakat					
		Belum optimalnya penanganan bencana					



### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2025-2029 didasarkan pada analisis terhadap isu strategis serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

##### **3.1 Tujuan**

Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Balikpapan Tengah dalam urusan pelayanan publik, maka tujuan jangka menengah yang ditetapkan pada Kecamatan Balikpapan Tengah dapat diuraikan sebagai berikut :

**“Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan”**

##### **3.2 Sasaran**

Sasaran merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam melayani masyarakat yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Balikpapan Tengah adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas Koordinasi dan Fungsi Kewilayahan di Tingkat Kecamatan;
- 2) Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Balikpapan Tengah beserta indikator kinerjanya dapat disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3. 1**  
**Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH</b>											
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	90,31	90,46	90,61	90,76	90,91	91,06	91,21	
		Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan.	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	67,67	68,84	70,07	71,3	72,53	73,76	75	

3.3 Strategi

Sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat kewilayahan, Kecamatan Balikpapan Tengah memiliki peran strategis untuk penguatan fungsi koordinasi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan berbasis kewilayahan serta penguatan ketentraman dan ketertiban umum sebagai bagian integrasi dari urusan pemerintahan umum dengan melakukan pentahapan strategi sebagai berikut:

**Tabel 3. 2**  
**Pentahapan Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah**

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Prima dan Adaptif	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Prima dan Adaptif	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Prima dan Adaptif	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Prima dan Adaptif	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Prima dan Adaptif

3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Balikpapan Tengah dalam Mencapai

**Tujuan dan Sasaran Renstra 2025 – 2029**

Arah kebijakan Kecamatan difokuskan pada terwujudnya penyelenggaraan urusan kewilayahan yang efektif, adaptif, dan akuntabel, dengan prioritas pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan akses dan mutu pelayanan publik, sinergi antar pemangku kepentingan, serta pengembangan inovasi pelayanan sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Kebijakan ini disusun untuk memastikan kesinambungan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat kewilayahan, sehingga seluruh tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan dapat dicapai secara terukur, efektif, dan berkelanjutan. Adapun Arah Kebijakan Kecamatan Balikpapan Tengah sebagai mana tertuang dalam tabel berikut

**Tabel 3. 3**  
**Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah**

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Pengembangan SPBE untuk meningkatkan kualitas pelayanan	1. Penguatan Pelayanan Publik	
			2. Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	
			3. Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	
			4. Penguatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			5. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan	
			6. Pengembangan Sumber Daya Manusia Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2025-2029 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan selama periode renstra di atas. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

- 1) Mempedomani RKJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029;
- 2) Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2025-2030, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Balikpapan.
- 3) Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Balikpapan;
- 4) Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Balikpapan Tengah;
- 5) Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan;
- 6) Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan.

**Tabel 4. 1**  
**Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH</b>							
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)		
		Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan.			Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan (%)		
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang Dilayani	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Sesuai Standar Pelayanan			
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan		Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Tercapai Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
					Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	7.01.03.2.03.0005 - Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
					Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
		Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		Terselenggaranya ketenteraman dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terwujudnya Kecamatan Taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial		Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terwujudnya profesionalisme aparatur perangkat daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terwujudnya layanan umum perkantoran perangkat daerah.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terwujudnya operasional umum perangkat daerah.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar berfungsi optimal.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN GUNUNG SARI ULU							
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan.	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan		Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Tercapai Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)		
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan		Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial				
				Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
7.01.0.00.0.00.02.0002 - KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR							
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan.	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan		Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Tercapai Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Terselenggaranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
						7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				dan Peraturan Kepala Daerah	Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial		Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0003 - KELURAHAN KARANG REJO</b>							
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan.	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan		Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Tercapai Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)		
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan		Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial				
				Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
7.01.0.00.0.00.02.0004 - KELURAHAN KARANG JATI							
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan.	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan		Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial		Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0005 - KELURAHAN MEKAR SARI</b>							
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan.	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan		Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)		
					Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tercapai Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terwujudnya Kecamatan Taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial		Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
7.01.0.00.0.00.02.0006 - KELURAHAN SUMBER REJO							
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan,	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
bersih dan akuntabel		Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan.	Pelayanan Publik di Kecamatan		Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)		
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan  Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan		Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Tercapai Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terwujudnya Kecamatan Taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial		Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

#### **4.2. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif**

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan 2025–2029, disusun rencana program, kegiatan, dan subkegiatan beserta pendanaan indikatif sebagai acuan pelaksanaan pembangunan di tingkat kewilayahan.

Adapun Rumusan rencana program, kegiatan dan subkegiatan besertaPendanaan Kecamatan Balikpapan Tengah selama periode Tahun 2025- 2029 sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
7.01 - KECAMATAN				41.108.397.110		42.881.316.000		45.025.382.000		45.925.890.000		47.303.667.000				
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				23.068.177.114		25.662.918.000		26.949.549.000		27.496.742.000		28.327.058.000				
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	86,63	87,25	23.068.177.114	87,5	25.662.918.000	87,75	26.949.549.000	88	27.496.742.000	88,25	28.327.058.000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				38.480.000		52.155.000		54.597.000		55.860.000		57.535.000				
Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	2	38.480.000	3	52.155.000	3	54.597.000	3	55.860.000	3	57.535.000				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	3		4		4		4		5					
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14.800.000		20.862.000		21.738.000		22.344.000		23.014.000				
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	3	14.800.000	4	20.862.000	4	21.738.000	4	22.344.000	5	23.014.000				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23.680.000		31.293.000		32.859.000		33.516.000		34.521.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	2	23.680.000	3	31.293.000	3	32.859.000	3	33.516.000	3	34.521.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.462.279.956		14.979.467.000		15.754.140.000		16.026.891.000		16.513.276.000		
Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	82	82	14.462.279.956	79	14.979.467.000	79	15.754.140.000	79	16.026.891.000	79	16.513.276.000		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.462.279.956		14.979.467.000		15.754.140.000		16.026.891.000		16.513.276.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	82	82	14.462.279.956	79	14.979.467.000	79	15.754.140.000	79	16.026.891.000	79	16.513.276.000		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				599.520.000		886.635.000		931.005.000		949.620.000		978.095.000		
Terwujudnya profesionalisme aparatur perangkat daerah.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	599.520.000	1	886.635.000	1	931.005.000	1	949.620.000	1	978.095.000		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	0	65		79		79		79		79			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				99.520.000		104.310.000		109.530.000		111.720.000		115.070.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	99.520.000	1	104.310.000	1	109.530.000	1	111.720.000	1	115.070.000		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis				500.000.000		782.325.000		821.475.000		837.900.000		863.025.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	0	65	500.000.000	79	782.325.000	79	821.475.000	79	837.900.000	79	863.025.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.087.667.700		2.819.645.000		2.962.785.000		3.022.026.000		3.112.642.000		
Terwujudnya layanan umum perkantoran perangkat daerah.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	2.087.667.700	24	2.819.645.000	24	2.962.785.000	24	3.022.026.000	24	3.112.642.000		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5	5		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0		300		300		300		300			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	16	8		10		10		10		10			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10	10		10		10		10					
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	21	2		5		5		5		5			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi  Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				85.264.620		104.310.000		109.530.000		111.720.000		115.070.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	85.264.620	1	104.310.000	1	109.530.000	1	111.720.000	1	115.070.000		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				108.253.110		521.550.000		547.650.000		558.600.000		575.350.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	21	2	108.253.110	5	521.550.000	5	547.650.000	5	558.600.000	5	575.350.000		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		15.000.000		16.429.000		16.758.000		17.260.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	2	0	2	15.000.000	2	16.429.000	2	16.758.000	2	17.260.000		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				839.788.460		990.945.000		1.040.535.000		1.061.340.000		1.093.165.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	16	8	839.788.460	10	990.945.000	10	1.040.535.000	10	1.061.340.000	10	1.093.165.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				286.658.150		312.930.000		328.590.000		335.160.000		345.210.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	2	286.658.150	2	312.930.000	2	328.590.000	2	335.160.000	2	345.210.000		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				131.497.500		140.818.000		147.865.000		150.822.000		155.344.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	131.497.500	24	140.818.000	24	147.865.000	24	150.822.000	24	155.344.000		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				51.705.860		62.586.000		65.718.000		67.032.000		69.042.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5	5	51.705.860	10	62.586.000	10	65.718.000	10	67.032.000	10	69.042.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				569.500.000		625.860.000		657.180.000		670.320.000		690.420.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10	10	569.500.000	10	625.860.000	10	657.180.000	10	670.320.000	10	690.420.000		
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		30.000.000		32.859.000		33.516.000		34.521.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	0	300	30.000.000	300	32.859.000	300	33.516.000	300	34.521.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				15.000.000		15.646.000		16.429.000		16.758.000		17.260.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	15.000.000	1	15.646.000	1	16.429.000	1	16.758.000	1	17.260.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				907.200.000		1.346.299.000		1.431.775.000		1.460.402.000		1.504.194.000		
Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	5	907.200.000	5	1.346.299.000	5	1.431.775.000	5	1.460.402.000	5	1.504.194.000		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	0		5		5		5		5			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	6		6		6		6		6			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	1	1		1		1		1		1			1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Lainnya yang Disediakan (Unit)													
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				93.600.000		97.634.000		102.520.000		104.569.000		107.705.000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3	1	93.600.000	1	97.634.000	1	102.520.000	1	104.569.000	1	107.705.000		
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				561.600.000		585.804.000		615.120.000		627.419.000		646.233.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	6	561.600.000	6	585.804.000	6	615.120.000	6	627.419.000	6	646.233.000		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		150.000.000		164.295.000		167.580.000		172.605.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	5	0	5	150.000.000	5	164.295.000	5	167.580.000	5	172.605.000		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		150.000.000		164.295.000		167.580.000		172.605.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	0	0	5	150.000.000	5	164.295.000	5	167.580.000	5	172.605.000		
7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				252.000.000		262.861.000		276.015.000		281.534.000		289.976.000		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	252.000.000	1	262.861.000	1	276.015.000	1	281.534.000	1	289.976.000		
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		100.000.000		109.530.000		111.720.000		115.070.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	2	100.000.000	2	109.530.000	2	111.720.000	2	115.070.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.323.943.258		3.624.154.000		3.805.518.000		3.881.607.000		3.998.000.000		
Terwujudnya operasional umum perangkat daerah.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	36	3.323.943.258	36	3.624.154.000	36	3.805.518.000	36	3.881.607.000	36	3.998.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	24		36		36		36		36			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				474.407.168		494.854.000		519.618.000		530.007.000		545.900.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	36	474.407.168	36	494.854.000	36	519.618.000	36	530.007.000	36	545.900.000		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.849.536.090		3.129.300.000		3.285.900.000		3.351.600.000		3.452.100.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	24	2.849.536.090	36	3.129.300.000	36	3.285.900.000	36	3.351.600.000	36	3.452.100.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang				1.649.086.200		1.954.563.000		2.009.729.000		2.100.336.000		2.163.316.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Urusan Pemerintahan Daerah														
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar berfungsi optimal.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	45	37	1.649.086.200	47	1.954.563.000	47	2.009.729.000	47	2.100.336.000	47	2.163.316.000		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7	9		10		10		10		10			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	187	232		232		232		232		232			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	10		0		0		0		0			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	20		20		20		20		20			
	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						23.807.000				41.724.000			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	1	1	23.807.000	1	41.724.000	1	43.812.000	1	44.688.000	1	46.028.000		

[illegible]



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.034.865.410		1.735.294.000		1.812.125.000		1.844.359.000		1.893.666.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	1.034.865.410	100	1.735.294.000	100	1.812.125.000	100	1.844.359.000	100	1.893.666.000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan				535.616.120		730.170.000		766.710.000		782.040.000		805.490.000		
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	3	6	535.616.120	6	730.170.000	6	766.710.000	6	782.040.000	6	805.490.000		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				535.616.120		730.170.000		766.710.000		782.040.000		805.490.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	3	6	535.616.120	6	730.170.000	6	766.710.000	6	782.040.000	6	805.490.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Instansi Vertikal Terkait (Laporan)													
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				77.369.355		104.310.000		109.530.000		111.720.000		115.070.000		
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang Dilayani Sesuai Standar Pelayanan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	300	300	77.369.355	300	104.310.000	300	109.530.000	300	111.720.000	300	115.070.000		
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				77.369.355		104.310.000		109.530.000		111.720.000		115.070.000		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	300	300	77.369.355	300	104.310.000	300	109.530.000	300	111.720.000	300	115.070.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	1.034.865.410	100	1.735.294.000	100	1.812.125.000	100	1.844.359.000	100	1.893.666.000	7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN GUNUNG SARI ULU	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan  Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				35.336.245		104.685.000		109.924.000		312.122.000		115.484.000		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	0	4	35.336.245	4	104.685.000	4	109.924.000	4	312.122.000	4	115.484.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Instansi Vertikal Terkait (Laporan)													
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				35.336.245		104.685.000		109.924.000		312.122.000		115.484.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	4	35.336.245	4	104.685.000	4	109.924.000	4	312.122.000	4	115.484.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	1.034.865.410	100	1.735.294.000	100	1.812.125.000	100	1.844.359.000	100	1.893.666.000	7.01.0.00.0.00.02.0002 - KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan				43.840.220		130.846.000		337.394.000		140.141.000		144.343.000		
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	4	43.840.220	4	130.846.000	4	337.394.000	4	140.141.000	4	144.343.000		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan				43.840.220		130.846.000		337.394.000		140.141.000		144.343.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	4	43.840.220	4	130.846.000	4	337.394.000	4	140.141.000	4	144.343.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	1.034.865.410	100	1.735.294.000	100	1.812.125.000	100	1.844.359.000	100	1.893.666.000	7.01.0.00.0.00.02.0003 - KELURAHAN KARANG REJO	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan  Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				51.531.540		145.846.000		153.144.000		156.206.000		160.890.000		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	4	51.531.540	4	145.846.000	4	153.144.000	4	156.206.000	4	160.890.000		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				51.531.540		145.846.000		153.144.000		156.206.000		160.890.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	0	4	51.531.540	4	145.846.000	4	153.144.000	4	156.206.000	4	160.890.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)													
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	1.034.865.410	100	1.735.294.000	100	1.812.125.000	100	1.844.359.000	100	1.893.666.000	7.01.0.00.0.00.02.0004 - KELURAHAN KARANG JATI	
	Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan  Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				185.060.000		97.508.000		102.388.000		104.435.000		107.567.000		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	4	185.060.000	4	97.508.000	4	102.388.000	4	104.435.000	4	107.567.000		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				185.060.000		97.508.000		102.388.000		104.435.000		107.567.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	0	4	185.060.000	4	97.508.000	4	102.388.000	4	104.435.000	4	107.567.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)													
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	1.034.865.410	100	1.735.294.000	100	1.812.125.000	100	1.844.359.000	100	1.893.666.000	7.01.0.00.0.00.02.0005 - KELURAHAN MEKAR SARI	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan  Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				45.579.730		301.097.000		106.156.000		108.279.000		111.525.000		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	4	45.579.730	4	301.097.000	4	106.156.000	4	108.279.000	4	111.525.000		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				45.579.730		301.097.000		106.156.000		108.279.000		111.525.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	4	45.579.730	4	301.097.000	4	106.156.000	4	108.279.000	4	111.525.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di	100	100	1.034.865.410	100	1.735.294.000	100	1.812.125.000	100	1.844.359.000	100	1.893.666.000	7.01.0.00.0.00.02.0006 - KELURAHAN SUMBER REJO	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelayanan Publik di Kecamatan	Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)													
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan				60.532.200		120.832.000		126.879.000		129.416.000		333.297.000		
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	4	60.532.200	4	120.832.000	4	126.879.000	4	129.416.000	4	333.297.000		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				60.532.200		120.832.000		126.879.000		129.416.000		333.297.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	4	60.532.200	4	120.832.000	4	126.879.000	4	129.416.000	4	333.297.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				15.905.055.654		13.800.590.000		14.494.521.000		14.782.752.000		15.226.869.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan	23,37	24,5	15.905.055.654	25	13.800.590.000	25,5	14.494.521.000	26	14.782.752.000	26	15.226.869.000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	masyarakat di wilayah kecamatan (%)													
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				224.877.185		234.697.000		245.405.000		251.370.000		258.907.000		
Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	2	3	224.877.185	3	234.697.000	3	245.405.000	3	251.370.000	3	258.907.000		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	30	80		80		80		80		80			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				91.396.380		93.879.000		98.577.000		100.548.000		103.563.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	30	80	91.396.380	80	93.879.000	80	98.577.000	80	100.548.000	80	103.563.000		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				133.480.805		140.818.000		146.828.000		150.822.000		155.344.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	2	3	133.480.805	3	140.818.000	3	146.828.000	3	150.822.000	3	155.344.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga				1.593.680.835		1.922.304.000		2.019.352.000		2.060.648.000		2.123.288.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan														
Tercapai Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	0	0	1.593.680.835	1	1.922.304.000	1	2.019.352.000	1	2.060.648.000	1	2.123.288.000		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	0	326		326		326		326		326			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	5	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2	1		1		1		1		1			
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				672.896.625		730.170.000		766.710.000		782.040.000		805.490.000		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	5	3	672.896.625	3	730.170.000	3	766.710.000	3	782.040.000	3	805.490.000		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				185.500.000		198.189.000		208.107.000		212.268.000		218.633.000		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan	0	326	185.500.000	326	198.189.000	326	208.107.000	326	212.268.000	326	218.633.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)													
7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan				0		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				499.845.500		730.170.000		766.710.000		782.040.000		805.490.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	2	2	499.845.500	2	730.170.000	2	766.710.000	2	782.040.000	2	805.490.000		
7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				235.438.710		260.775.000		273.825.000		279.300.000		287.675.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2	1	235.438.710	1	260.775.000	1	273.825.000	1	279.300.000	1	287.675.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	23,37	24,5	15.905.055.654	25	13.800.590.000	25,5	14.494.521.000	26	14.782.752.000	26	15.226.869.000	7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN GUNUNG SARI ULU	
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100				100				100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.015.881.650		561.967.000		590.091.000		601.890.000		619.938.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	0	1.015.881.650	1	561.967.000	1	590.091.000	1	601.890.000	1	619.938.000		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	45	43		43		43		43		43			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	108	53		5		5		5		5			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				29.596.330		33.639.000		35.323.000		36.029.000		37.110.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	45	43	29.596.330	43	33.639.000	43	35.323.000	43	36.029.000	43	37.110.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				862.285.320		342.136.000		359.258.000		366.441.000		377.429.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	108	53	862.285.320	5	342.136.000	5	359.258.000	5	366.441.000	5	377.429.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				124.000.000		180.977.000		190.034.000		193.834.000		199.646.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2	124.000.000	2	180.977.000	2	190.034.000	2	193.834.000	2	199.646.000		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				0		5.215.000		5.476.000		5.586.000		5.753.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	0	0	1	5.215.000	1	5.476.000	1	5.586.000	1	5.753.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				916.731.450		956.522.000		1.004.390.000		1.024.472.000		1.055.191.000		
Tercapai Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	44	41	916.731.450	41	956.522.000	41	1.004.390.000	41	1.024.472.000	41	1.055.191.000		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				916.731.450		956.522.000		1.004.390.000		1.024.472.000		1.055.191.000		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	44	41	916.731.450	41	956.522.000	41	1.004.390.000	41	1.024.472.000	41	1.055.191.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	23,37	24,5	15.905.055.654	25	13.800.590.000	25,5	14.494.521.000	26	14.782.752.000	26	15.226.869.000	7.01.0.00.0.00.02.0002 - KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.252.323.420		919.752.000		965.778.000		985.089.000		1.014.628.000		
Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		53	1.252.323.420	5	919.752.000	5	965.778.000	5	985.089.000	5	1.014.628.000		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	73	71		71		71		71		71			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				37.063.660		55.545.000		58.324.000		59.490.000		61.274.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	73	71	37.063.660	71	55.545.000	71	58.324.000	71	59.490.000	71	61.274.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.077.259.760		575.791.000		604.605.000		616.694.000		635.186.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		53	1.077.259.760	5	575.791.000	5	604.605.000	5	616.694.000	5	635.186.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				138.000.000		283.201.000		297.373.000		303.319.000		312.415.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2	138.000.000	2	283.201.000	2	297.373.000	2	303.319.000	2	312.415.000		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				0		5.215.000		5.476.000		5.586.000		5.753.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	0	0	1	5.215.000	1	5.476.000	1	5.586.000	1	5.753.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.484.953.493		1.549.003.000		1.626.520.000		1.659.042.000		1.708.789.000		
Tercapai Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	71	69	1.484.953.493	69	1.549.003.000	69	1.626.520.000	69	1.659.042.000	69	1.708.789.000		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.484.953.493		1.549.003.000		1.626.520.000		1.659.042.000		1.708.789.000		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	71	69	1.484.953.493	69	1.549.003.000	69	1.626.520.000	69	1.659.042.000	69	1.708.789.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah	23,37	24,5	15.905.055.654	25	13.800.590.000	25,5	14.494.521.000	26	14.782.752.000	26	15.226.869.000	7.01.0.00.0.00.02.0003 - KELURAHAN KARANG REJO	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembangunan di Kecamatan	pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)													
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.752.824.555		1.149.754.000		1.207.292.000		1.231.433.000		1.268.358.000		
Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2	1.752.824.555	2	1.149.754.000	2	1.207.292.000	2	1.231.433.000	2	1.268.358.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	170	64		5		5		5		5			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	91	89		89		89		89		89			
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				45.770.900		69.626.000		73.111.000		74.573.000		76.809.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam	91	89	45.770.900	89	69.626.000	89	73.111.000	89	74.573.000	89	76.809.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)													
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.241.771.435		725.997.000		762.328.000		777.571.000		800.887.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	170	64	1.241.771.435	5	725.997.000	5	762.328.000	5	777.571.000	5	800.887.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				465.282.220		348.916.000		366.377.000		373.703.000		384.909.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2	465.282.220	2	348.916.000	2	366.377.000	2	373.703.000	2	384.909.000		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				0		5.215.000		5.476.000		5.586.000		5.753.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	0	0	1	5.215.000	1	5.476.000	1	5.586.000	1	5.753.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.696.052.985		1.773.270.000		1.862.010.000		1.899.240.000		1.956.190.000		
Tercapai Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	89	87	1.696.052.985	87	1.773.270.000	87	1.862.010.000	87	1.899.240.000	87	1.956.190.000		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.696.052.985		1.773.270.000		1.862.010.000		1.899.240.000		1.956.190.000		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	89	87	1.696.052.985	87	1.773.270.000	87	1.862.010.000	87	1.899.240.000	87	1.956.190.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Lembaga Kemasyarakatan)													
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	23,37	24,5	15.905.055.654	25	13.800.590.000	25,5	14.494.521.000	26	14.782.752.000	26	15.226.869.000	7.01.0.00.0.00.02.0004 - KELURAHAN KARANG JATI	
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				952.704.089		459.745.000		482.752.000		492.404.000		507.168.000		
Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	0	952.704.089	1	459.745.000	1	482.752.000	1	492.404.000	1	507.168.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	107	55		5		5		5		5			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	37	35		35		35		35		35			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2		2		2		2		2			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan				30.295.660		27.381.000		28.751.000		29.326.000		30.205.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembangunan di Kelurahan														
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	37	35	30.295.660	35	27.381.000	35	28.751.000	35	29.326.000	35	30.205.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				856.228.429		275.378.000		289.159.000		294.940.000		303.784.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	107	55	856.228.429	5	275.378.000	5	289.159.000	5	294.940.000	5	303.784.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				66.180.000		151.771.000		159.366.000		162.552.000		167.426.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2	66.180.000	2	151.771.000	2	159.366.000	2	162.552.000	2	167.426.000		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				0		5.215.000		5.476.000		5.586.000		5.753.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	0	0	1	5.215.000	1	5.476.000	1	5.586.000	1	5.753.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				751.726.665		784.411.000		823.665.000		840.134.000		865.326.000		
Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	35	33	751.726.665	33	784.411.000	33	823.665.000	33	840.134.000	33	865.326.000		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan				751.726.665		784.411.000		823.665.000		840.134.000		865.326.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Lembaga Kemasyarakatan														
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	35	33	751.726.665	33	784.411.000	33	823.665.000	33	840.134.000	33	865.326.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	23,37	24,5	15.905.055.654	25	13.800.590.000	25,5	14.494.521.000	26	14.782.752.000	26	15.226.869.000	7.01.0.00.0.00.02.0005 - KELURAHAN MEKAR SARI	
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100				100				100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				996.285.820		510.856.000		539.914.000		547.148.000		563.553.000		
Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	41	39	996.285.820	39	510.856.000	39	539.914.000	39	547.148.000	39	563.553.000		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	0				1				1			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	2				2				2			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	370	57				5				5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				41.204.000		30.510.000		32.037.000		32.678.000		33.657.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	41	39	41.204.000	39	30.510.000	39	32.037.000	39	32.678.000	39	33.657.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				881.081.820		308.757.000		324.208.000		330.691.000		340.607.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	370	57	881.081.820	5	308.757.000	5	324.208.000	5	330.691.000	5	340.607.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				74.000.000		166.374.000		178.193.000		178.193.000		183.536.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	2	74.000.000	2	166.374.000	2	178.193.000	2	178.193.000	2	183.536.000		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				0		5.215.000		5.476.000		5.586.000		5.753.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	0	0	1	5.215.000	1	5.476.000	1	5.586.000	1	5.753.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				843.331.187		880.376.000		924.433.000		942.916.000		971.190.000		
Tercapai Keaktifan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	39	37	843.331.187	37	880.376.000	37	924.433.000	37	942.916.000	37	971.190.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kemasyarakatan di Kecamatan	Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)													
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				843.331.187		880.376.000		924.433.000		942.916.000		971.190.000		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	39	37	843.331.187	37	880.376.000	37	924.433.000	37	942.916.000	37	971.190.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	23,37	24,5	15.905.055.654	25	13.800.590.000	25,5	14.494.521.000	26	14.782.752.000	26	15.226.869.000	7.01.0.00.0.00.02.0006 - KELURAHAN SUMBER REJO	
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100				100				100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.171.832.320		791.972.000		831.604.000		848.232.000		873.667.000		
Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	0	1.171.832.320	1	791.972.000	1	831.604.000	1	848.232.000	1	873.667.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	192	51		5		5		5		5			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam	63	61		61		61		61		61			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)													
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				43.674.000		47.721.000		50.109.000		51.111.000		52.644.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	63	61	43.674.000	61	47.721.000	61	50.109.000	61	51.111.000	61	52.644.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.010.158.320		492.343.000		516.981.000		527.318.000		543.130.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	192	51	1.010.158.320	5	492.343.000	5	516.981.000	5	527.318.000	5	543.130.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				118.000.000		246.693.000		259.038.000		264.217.000		272.140.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2	118.000.000	2	246.693.000	2	259.038.000	2	264.217.000	2	272.140.000		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				0		5.215.000		5.476.000		5.586.000		5.753.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	0	0	1	5.215.000	1	5.476.000	1	5.586.000	1	5.753.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.251.850.000		1.305.961.000		1.371.315.000		1.398.734.000		1.440.676.000		
Tercapai Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	61	59	1.251.850.000	59	1.305.961.000	59	1.371.315.000	59	1.398.734.000	59	1.440.676.000		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.251.850.000		1.305.961.000		1.371.315.000		1.398.734.000		1.440.676.000		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	61	59	1.251.850.000	59	1.305.961.000	59	1.371.315.000	59	1.398.734.000	59	1.440.676.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				918.125.557		1.453.032.000		1.528.221.000		1.556.253.000		1.602.920.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	918.125.557	100	1.453.032.000	100	1.528.221.000	100	1.556.253.000	100	1.602.920.000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				193.556.105		260.775.000		273.825.000		279.300.000		287.675.000		
Terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	16	193.556.105	14	260.775.000	14	273.825.000	14	279.300.000	14	287.675.000		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,				193.556.105		260.775.000		273.825.000		279.300.000		287.675.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	16	193.556.105	14	260.775.000	14	273.825.000	14	279.300.000	14	287.675.000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				118.739.790		125.172.000		131.436.000		134.064.000		138.084.000		
Terwujudnyas Kecamatan Taati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	15	118.739.790	15	125.172.000	15	131.436.000	15	134.064.000	15	138.084.000		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				118.739.790		125.172.000		131.436.000		134.064.000		138.084.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas	0	15	118.739.790	15	125.172.000	15	131.436.000	15	134.064.000	15	138.084.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)													
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	918.125.557	100	1.453.032.000	100	1.528.221.000	100	1.556.253.000	100	1.602.920.000	7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN GUNUNG SARI ULU	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				83.107.000		117.870.000		123.768.000		126.243.000		130.029.000		
Terselenggaranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	15	83.107.000	14	117.870.000	14	123.768.000	14	126.243.000	15	130.029.000		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				83.107.000		117.870.000		123.768.000		126.243.000		130.029.000		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	15	83.107.000	14	117.870.000	14	123.768.000	14	126.243.000	15	130.029.000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan				33.000.000		70.930.000		74.480.000		75.969.000		78.247.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	33.000.000	15	70.930.000	15	74.480.000	15	75.969.000	15	78.247.000		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				33.000.000		70.930.000		74.480.000		75.969.000		78.247.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	33.000.000	15	70.930.000	15	74.480.000	15	75.969.000	15	78.247.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	918.125.557	100	1.453.032.000	100	1.528.221.000	100	1.556.253.000	100	1.602.920.000	7.01.0.00.0.00.02.0002 - KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				64.951.664		117.870.000		123.768.000		126.243.000		130.029.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	15	64.951.664	14	117.870.000	14	123.768.000	14	126.243.000	14	130.029.000		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				64.951.664		117.870.000		123.768.000		126.243.000		130.029.000		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	15	64.951.664	14	117.870.000	14	123.768.000	14	126.243.000	14	130.029.000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				32.916.216		70.930.000		74.480.000		75.969.000		78.247.000		
Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	32.916.216	15	70.930.000	15	74.480.000	15	75.969.000	15	78.247.000		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi				32.916.216		70.930.000		74.480.000		75.969.000		78.247.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	32.916.216	15	70.930.000	15	74.480.000	15	75.969.000	15	78.247.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	918.125.557	100	1.453.032.000	100	1.528.221.000	100	1.556.253.000	100	1.602.920.000	7.01.0.00.0.00.02.0003 - KELURAHAN KARANG REJO	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				64.981.077		95.965.000		100.767.000		102.782.000		105.864.000		
Terselenggaranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	15	64.981.077	14	95.965.000	14	100.767.000	14	102.782.000	14	105.864.000		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi				64.981.077		95.965.000		100.767.000		102.782.000		105.864.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Vertikal di Wilayah Kecamatan														
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	15	64.981.077	14	95.965.000	14	100.767.000	14	102.782.000	14	105.864.000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				32.959.850		70.930.000		74.480.000		75.969.000		78.247.000		
Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	32.959.850	15	70.930.000	15	74.480.000	15	75.969.000	15	78.247.000		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				32.959.850		70.930.000		74.480.000		75.969.000		78.247.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	0	14	32.959.850	15	70.930.000	15	74.480.000	15	75.969.000	15	78.247.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)													
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	918.125.557	100	1.453.032.000	100	1.528.221.000	100	1.556.253.000	100	1.602.920.000	7.01.0.00.0.00.02.0004 - KELURAHAN KARANG JATI	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				64.976.625		117.870.000		126.243.000		126.243.000		130.029.000		
Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	15	64.976.625	14	117.870.000	14	126.243.000	14	126.243.000	14	130.029.000		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				64.976.625		117.870.000		126.243.000		126.243.000		130.029.000		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	15	64.976.625	14	117.870.000	14	126.243.000	14	126.243.000	14	130.029.000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				33.000.000		70.930.000		74.480.000		75.969.000		78.247.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	33.000.000	15	70.930.000	15	74.480.000	15	75.969.000	15	78.247.000		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				33.000.000		70.930.000		74.480.000		75.969.000		78.247.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	33.000.000	15	70.930.000	15	74.480.000	15	75.969.000	15	78.247.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	918.125.557	100	1.453.032.000	100	1.528.221.000	100	1.556.253.000	100	1.602.920.000	7.01.0.00.0.00.02.0005 - KELURAHAN MEKAR SARI	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				64.999.700		95.965.000		100.767.000		102.782.000		105.864.000		
Terselenggaranya Ketentraman dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan	0	15	64.999.700	14	95.965.000	14	100.767.000	14	102.782.000	14	105.864.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)													
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				64.999.700		95.965.000		100.767.000		102.782.000		105.864.000		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	15	64.999.700	14	95.965.000	14	100.767.000	14	102.782.000	14	105.864.000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				33.000.000		70.930.000		74.480.000		75.969.000		78.247.000		
Terwujudnya Kecamatan Taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	33.000.000	15	70.930.000	15	74.480.000	15	75.969.000	15	78.247.000		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan				33.000.000		70.930.000		74.480.000		75.969.000		78.247.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	33.000.000	15	70.930.000	15	74.480.000	15	75.969.000	15	78.247.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	918.125.557	100	1.453.032.000	100	1.528.221.000	100	1.556.253.000	100	1.602.920.000	7.01.0.00.0.00.02.0006 - KELURAHAN SUMBER REJO	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				64.975.000		95.965.000		100.767.000		102.782.000		105.864.000		
Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	15	64.975.000	14	95.965.000	14	100.767.000	14	102.782.000	14	105.864.000		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				64.975.000		95.965.000		100.767.000		102.782.000		105.864.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	15	64.975.000	14	95.965.000	14	100.767.000	14	102.782.000	14	105.864.000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				32.962.530		70.930.000		74.480.000		75.969.000		78.247.000		
Terwujudnya Kecamatan Taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	32.962.530	15	70.930.000	15	74.480.000	15	75.969.000	15	78.247.000		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				32.962.530		70.930.000		74.480.000		75.969.000		78.247.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	0	14	32.962.530	15	70.930.000	15	74.480.000	15	75.969.000	15	78.247.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Negara Republik Indonesia	Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)													
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				182.173.375		229.482.000		240.966.000		245.784.000		253.154.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	182.173.375	100	229.482.000	100	240.966.000	100	245.784.000	100	253.154.000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				92.293.030		104.310.000		109.530.000		111.720.000		115.070.000		
Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	150	92.293.030	200	104.310.000	200	109.530.000	200	111.720.000	200	115.070.000		
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,				92.293.030		104.310.000		109.530.000		111.720.000		115.070.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	150	92.293.030	200	104.310.000	200	109.530.000	200	111.720.000	200	115.070.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	182.173.375	100	229.482.000	100	240.966.000	100	245.784.000	100	253.154.000	7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN GUNUNG SARI ULU	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				15.000.000		20.862.000		21.906.000		22.344.000		23.014.000		
Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	0	75	15.000.000	75	20.862.000	75	21.906.000	75	22.344.000	75	23.014.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				15.000.000		20.862.000		21.906.000		22.344.000		23.014.000		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	0	75	15.000.000	75	20.862.000	75	21.906.000	75	22.344.000	75	23.014.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	182.173.375	100	229.482.000	100	240.966.000	100	245.784.000	100	253.154.000	7.01.0.00.0.00.02.0002 - KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				15.000.000		20.862.000		21.906.000		22.344.000		23.014.000		
Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	75	15.000.000	75	20.862.000	75	21.906.000	75	22.344.000	75	23.014.000		
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,				15.000.000		20.862.000		21.906.000		22.344.000		23.014.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	75	15.000.000	75	20.862.000	75	21.906.000	75	22.344.000	75	23.014.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	182.173.375	100	229.482.000	100	240.966.000	100	245.784.000	100	253.154.000	7.01.0.00.0.00.02.0003 - KELURAHAN KARANG REJO	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				14.999.640		20.862.000		21.906.000		22.344.000		23.014.000		
Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	0	75	14.999.640	75	20.862.000	75	21.906.000	75	22.344.000	75	23.014.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				14.999.640		20.862.000		21.906.000		22.344.000		23.014.000		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	0	75	14.999.640	75	20.862.000	75	21.906.000	75	22.344.000	75	23.014.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	182.173.375	100	229.482.000	100	240.966.000	100	245.784.000	100	253.154.000	7.01.0.00.0.00.02.0004 - KELURAHAN KARANG JATI	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				14.901.265		20.862.000		21.906.000		22.344.000		23.014.000		
Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	75	14.901.265	75	20.862.000	75	21.906.000	75	22.344.000	75	23.014.000		
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,				14.901.265		20.862.000		21.906.000		22.344.000		23.014.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	75	14.901.265	75	20.862.000	75	21.906.000	75	22.344.000	75	23.014.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	182.173.375	100	229.482.000	100	240.966.000	100	245.784.000	100	253.154.000	7.01.0.00.0.00.02.0005 - KELURAHAN MEKAR SARI	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				14.994.580		20.862.000		21.906.000		22.344.000		23.014.000		
Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	0	75	14.994.580	75	20.862.000	75	21.906.000	75	22.344.000	75	23.014.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				14.994.580		20.862.000		21.906.000		22.344.000		23.014.000		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	0	75	14.994.580	75	20.862.000	75	21.906.000	75	22.344.000	75	23.014.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	182.173.375	100	229.482.000	100	240.966.000	100	245.784.000	100	253.154.000	7.01.0.00.0.00.02.0006 - KELURAHAN SUMBER REJO	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				14.984.860		20.862.000		21.906.000		22.344.000		23.014.000		
Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	75	14.984.860	75	20.862.000	75	21.906.000	75	22.344.000	75	23.014.000		
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,				14.984.860		20.862.000		21.906.000		22.344.000		23.014.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	75	14.984.860	75	20.862.000	75	21.906.000	75	22.344.000	75	23.014.000		

#### **4.3 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Sebagai upaya memastikan keterpaduan antara perencanaan kewilayahan di tingkat kecamatan dengan arah pembangunan daerah, disusun daftar subkegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut memuat subkegiatan terpilih yang memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian target RPJMD.

Tabel 4. 3 Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
2.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
3.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
4.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN GUNUNG SARI ULU</b>				
5.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
6.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	



NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
7.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
8.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
7.01.0.00.0.00.02.0002 - KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR				

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
9.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
10.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
11.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
12.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
			<p>7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0003 - KELURAHAN KARANG REJO</b>				
13.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	<p>7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <p>7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</p>	
14.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	<p>7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</p> <p>7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</p> <p>7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</p> <p>7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</p> <p>7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan</p> <p>7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</p> <p>7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</p>	
15.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	<p>7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p>7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</p>	

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
			7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
16.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0004 - KELURAHAN KARANG JATI</b>				
17.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
18.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
19.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
20.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0005 - KELURAHAN MEKAR SARI</b>				
21.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
22.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
23.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
24.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
			serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0006 - KELURAHAN SUMBER REJO</b>				
25.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
26.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
27.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
28.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1	Transformasi Birokrasi		Bimtek Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan  Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Bimtek Pelayanan Publik bagi Aparatur  Pengembangan aplikasi Laporan RT
2	Mengatasi Stunting		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rembug Stunting, fasilitasi TPPS, Pembinaan Kader Posyandu, Sosialisasi Gizi dan Pola Asuh



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan dan Pemeliharaan Posyandu
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Kader Posyandu, Pegolahan Makanan Sehat dan Bergizi
3	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Penyediaan Bahan Logistik	Pelaksanaan Senam Gabungan, Germas dan PHBS tingkat Kecamatan
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jambore UKS Tingkat Kecamatan, Kegiatan Pokja PAUD
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (PKK)	Lomba PHBS, Lomba LBS, Lomba Posyandu, Lomba Asman Toga, Lomba Kader Penyuluh, Program Gelari Pelangi
4	Penyediaan air bersih yang sehat dan merata		Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Lomba Teknologi Tepat Guna, Sarana Panen Air Hujan
5	Pengendalian Banjir		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pemeliharaan Saluran Drainase
6	Lingkungan Hidup dan Sosial yang Sehat dan Nyaman		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Lomba CGH Tingkat Kecamatan, Pembinaan Bank Sampah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kerja Bakti Massal, Lomba Gerakan Menanam Serentak, Lomba HATINYA PKK, Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan
7	Balikpapan Kota MICE dan Wisata		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Wisata Edukasi Kampung Kangkung Kang Bejo Kel.Sumber Rejo Kampung Bungas Kelurahan Gunung Sari Ilir
8	Balikpapan Kota Inovatif dan Kreatif		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Festival Ekonomi Kreatif Balikpapan Tengah, Bazar UMKM dan Produk Ekraf di seluruh Kelurahan
			Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Teknologi Tepat Guna (Lomba, Workshop dan Pameran)

#### **4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan merupakan tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan 2025–2029. Penyusunan IKU ini memperhatikan keselarasan terhadap RPJMD Kota Balikpapan dan prioritas pembangunan kewilayahan Kecamatan Balikpapan Tengah. Tabel berikut menyajikan daftar IKU Kecamatan Balikpapan Tengah beserta target kinerjanya, yang menjadi acuan dalam pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

**Tabel 4. 4**  
**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Tengah**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH									
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	90,31	90,46	90,61	90,76	90,91	91,06	91,21	
3.	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	67,67	68,84	70,07	71,3	72,53	73,76	75	

#### **4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kecamatan Balikpapan Tengah disusun sebagai ukuran capaian pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2025–2029. Penyusunan IKK ini memastikan keterkaitan langsung dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan program prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut menyajikan daftar IKK beserta target tahunannya sebagai acuan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja penyelenggaraan kewilayahan di tingkat kecamatan.

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	7.01 - KECAMATAN										
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	positif	Indeks	90,31	90,46	90,61	90,76	90,91	91,06	91,21	
3.	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	positif	Nilai	67,67	68,84	70,07	71,3	72,53	73,76	75	
5.	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	positif	Indeks	86,63	87	87,25	87,5	87,75	88	88,25	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
8.	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	positif	%	23,37	24	24,5	25	25,5	26	26	
10.	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029 ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029 Urusan Kewilayahan. Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya bahwa Renstra SKPD ini disusun dengan mempertimbangkan Aspek Legalitas, Aspek Perimbangan Kewenangan Pusat dan Daerah terutama dalam era otonomi pembangunan dan aspek perencanaan strategis, dikemukakan pula Visi, Misi dan selanjutnya dirumuskan kedalam prioritas kebijakan pembangunan, serta melalui penetapan Tujuan, Strategi, Sasaran, Kebijakan, dan Program Pembangunan.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pemerintah Kota Balikpapan untuk tercapainya sasaran Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Kalimantan Timur. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah ini akan menjadi acuan dalam Penilaian Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dalam 5 tahun ke depan. Semoga upaya Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dalam 5 tahun dapat lebih terarah dan terukur.

Harus diperhatikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Balikpapan Tengah merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Balikpapan Tengah.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah serta Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan. Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan target kinerja Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan.



## AE. KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan, maka setiap perangkat daerah, termasuk Kecamatan Balikpapan Kota, berkewajiban untuk Menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerjanya.

Renstra Kecamatan Balikpapan Kota disusun mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Sebagai unit kerja perangkat daerah yang menjalankan sebagian kewenangan Wali Kota di tingkat wilayah, Kecamatan Balikpapan Kota memiliki posisi strategis dalam memastikan sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dengan dinamika kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan. Oleh karena itu, penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2026-2030 dilakukan secara sistematis dan partisipatif, dengan mempertimbangkan kondisi actual wilayah, potensi local, isu-isu strategis, serta hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya.

Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) Kecamatan serta menjadi instrument pengukuran kinerja aparatur kecamatan dalam mewujudkan pelayanan public yang prima, tata Kelola pemerintahan yang baik, serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan di wilayah Kecamatan Balikpapan Kota.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan seluruh jajaran Kecamatan Balikpapan Kota dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih terarah, terukur, dan akuntabel guna mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Balikpapan secara keseluruhan.

#### 1.2 Dasar Hukum

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025 – 2029 disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 58889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan tahun 2012-2032 (lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan lembaran daerah Kota Balikpapan Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 54);
21. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 57).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, serta hambatan yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program dengan mengantisipasi perkembangan masa depan;
2. Sebagai pedoman dalam Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang lazim disebut dengan rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Satuan Kerja Perangkat daerah kecamatan Balikpapan Kota;
3. Sebagai barometer hasil kinerja pemerintah Kecamatan Balikpapan Kota.

Tujuan dari Rencana Strategis Pemerintah kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan tahun 2025-2029, diantaranya sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Kecamatan Balikpapan Kota untuk kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
2. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Balikpapan Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029;

### 1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Balikpapan Kota ini meliputi beberapa bagian, antara lain :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat tentang Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah (Tugas, fungsi, struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah dan kelompok sasaran layanan) dan Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah (Permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis)

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat informasi tentang Tujuan Renstra Perangkat Daerah, Sasaran Renstra Perangkat Daerah, Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

#### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat tentang rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target

Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## **BAB V      PENUTUP**

Memuat tentang kesimpulan penting substansial kadijah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Balikpapan Kota**

##### **a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Kecamatan Balikpapan Kota merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Balikpapan yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Kecamatan Balikpapan Kota dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan sebagian tugas Camat dilaksanakan oleh Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan. Kelurahan berkedudukan di bawah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Kecamatan Balikpapan Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota dan tugas pemerintahan lainnya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Kota mengacu pada Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, sesuai pasal 5, Camat menyelenggarakan fungsi :

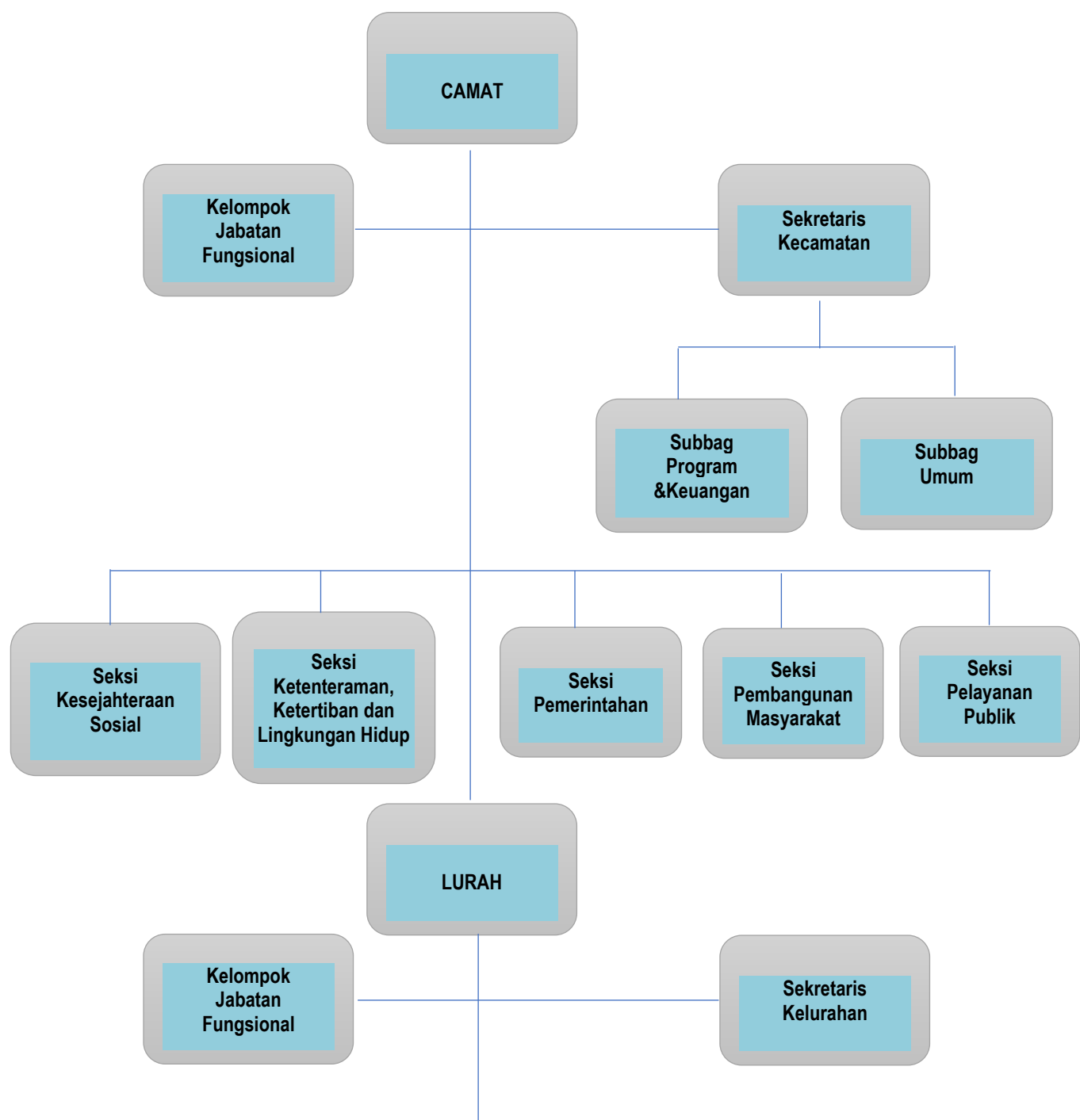
1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
10. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;

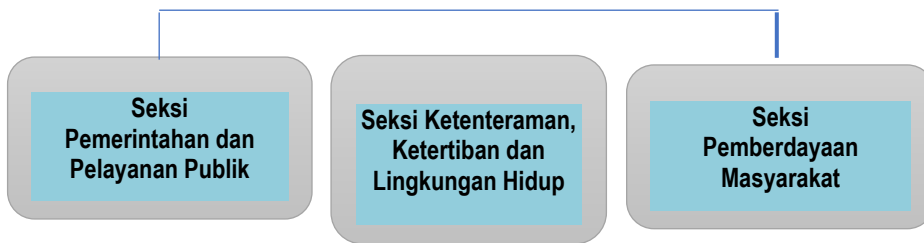
- 11. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
- 12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- 13. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara geografis Kecamatan Balikpapan Kota memiliki luas wilayah 11,10 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 5 (lima) Kelurahan, yaitu :

- 1. Kelurahan Klandasan Ulu;
- 2. Kelurahan Klandasan Ilir;
- 3. Kelurahan Damai;
- 4. Kelurahan Prapatan; dan
- 5. Kelurahan Telaga Sari.

Adapun struktur Kecamatan Balikpapan Kota beserta tugas sebagai berikut :





**Gambar 2.1**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA**

Sumber : Perwali No 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan

## 1. CAMAT

Camat sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani Sebagian urusan otonomi Daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

## 2. SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan, melaksanakan pelayanan administrasi umum dan tata usaha, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan masing-masing seksi.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian :

- Penyusunan program;
- Pengelolaan urusan keuangan;
- Kepegawaian;
- Rumah tangga kantor;
- Perlengkapan;
- Protokol;
- Hubungan masyarakat;
- Kearsipan;
- Surat menyurat; dan
- Evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretariat membawahi subbagian dan setiap subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang bertanggungjawab kepada sekretaris.

- Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;



- d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- f. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. Pengelolaan anggaran kecamatan dan penerimaan Retribusi;
- h. Pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **SUBBAGIAN UMUM**

Subbagian umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
- g. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- i. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- k. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

➤ **SUBBAGIAN KEUANGAN**

Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
  1. Rencana strategis;
  2. Rencana kerja;
  3. Rencana kerja tahunan;
  4. Penetapan kinerja; dan
  5. Laporan kinerja;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- g. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- i. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
- j. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- k. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
- l. Menyusun laporan keuangan kecamatan;
  
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

➤ **SEKSI PEMERINTAHAN**

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah Kecamatan;
- c. Memfasilitasi permasalahan pertanahan di wilayah Kecamatan;
- d. Melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan;
- e. Memfasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan;

- f. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan;
- g. Menyusun dokumen monografi Kecamatan;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

➤ **SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan kemasyarakatan;
- c. Melaksanakan pengawasan rumah sewa/pondokan;
- d. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. Melaksanakan pengoordinasian pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin;
- f. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- i. Memfasilitasi permasalahan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketenteraman dan ketertiban wilayah serta antisipasi bencana alam;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

➤ **SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT**

Seksi Pembangunan Masyarakat dipimpin oleh kepala seksi yang

berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat. Seksi Pembangunan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pembangunan masyarakat;
- b. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
- c. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan;
- d. Memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian;
- e. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
- f. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
- i. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program pembangunan Kelurahan dan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- j. Menyusun dokumen profil Kecamatan;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

➤ **SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas, antara lain :

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial;
- b. Memfasilitasi penanggulangan bencana, pasca bencana dan pengungsi serta masalah sosial;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
- e. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat bergama;
- f. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
- g. Melaksanakan fasilitasi pembinaan program usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

➤ **SEKSI PELAYANAN PUBLIK**

Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas, antara lain :

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi Pelayanan Publik;
- b. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan;
- d. Menyusun Standar Operasional Prosedur;
- e. Menyusun Standar Pelayanan;
- f. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
- g. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu;
- h. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- i. Mengelola layanan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan
- j. Memfasilitasi dan menindaklanjuti hasil pengaduan warga terhadap pelayanan;
- k. Melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat;
- l. Melaksanakan tatakelola pelayanan publik;
- m. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
- n. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketenteraman, ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
- o. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pada kelurahan;
- p. Melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
- q. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
- r. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

➤ **LURAH**

Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kelurahan. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Dalam Pasal 17, Lurah mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan Kelurahan
- b. Melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat;

- d. Menyelenggarakan dan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- e. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Menyelenggarakan administrasi kependudukan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- h. Menyusun dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
- i. Membina lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **SEKRETARIS LURAH**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Lurah mempunyai tugas:

1. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
  - a. Rencana strategis;
  - b. Rencana kerja;
  - c. Rencana kerja tahunan;
  - d. Penetapan kinerja; dan
  - e. Laporan kinerja;
2. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
3. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
4. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
5. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
7. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
8. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
9. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
10. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
11. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
12. Menyusun laporan keuangan kelurahan;
13. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
14. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
15. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
16. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
17. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;

18. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
19. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
20. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
21. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
22. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
23. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
24. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
25. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
26. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
27. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



#### **SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas, antara lain :

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
4. Melaksanakan administrasi pertanahan;
5. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
6. Melaksanakan pembinaan rukun tetangga;
7. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
8. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
9. Menyusun standar operasional dan prosedur pelayanan dan menyusun standar pelayanan lingkup kelurahan;
10. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
11. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi pelayanan publik;
12. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
13. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan
14. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
15. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketenteraman dan Ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;

16. Melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
17. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
18. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
19. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

➤ **SEKSI KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas, antara lain :

1. Menyusun program dan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
2. Melaksanakan layanan bidang ketenteraman dan ketertiban serta layanan surat pengantar izin pertunjukan dan keramaian;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
4. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan;
5. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;
6. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
7. Memfasilitasi permasalahan di bidang ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
8. Melaksanakan koordinasi ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup dengan instansi terkait, lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan rukun tetangga;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

➤ **SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas, antara lain :

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
2. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan;
3. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadaya masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
5. Melaksanakan pembinaan penataan pembangunan permukiman penduduk;



- 6. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan;
- 7. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- 8. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat bergama;
- 9. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
- 10. Melaksanakan fasilitasi pendataan masyarakat rentan masalah sosial dan keluarga miskin;
- 11. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial;
- 12. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
- 13. Melaksanakan fasilitasi pembinaan program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
- 14. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kegiatan/program kesehatan masyarakat, kesehatan Ibu dan anak serta keluarga berencana;
- 15. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha kesejahteraan rakyat;
- 16. Melaksanakan fasilitasi penanggulangan korban bencana;
- 17. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- 18. Melaksanakan penyusunan profil kelurahan;
- 19. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- 20. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**b. Sumber Daya Kecamatan Balikpapan Kota**

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran. Adapun penggunaan atas sumber daya tersebut adalah sebagai berikut :

**1. Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Kecamatan Balikpapan Kota sebagai unit pelayanan public yang baik dan akuntabel.

Berdasarkan analisis beban kerja, cakupan wilayah yang sangat luas dan perlunya koordinasi yang intens Kecamatan Balikpapan Kota, SDM yang ada belum memenuhi dari kebutuhan yang seharusnya. Komposisi Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota berdasarkan beberapa kriteria pada tahun 2025 adalah sebagaimana tertera pada Tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
Kecamatan Balikpapan Kota		13	14	27
1	Camat	1	0	1
2	Sekretaris	1	0	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan	0	0	0
4	Kepala Seksi Pelayanan Publik	0	1	1
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	1	0	1
6	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban & LH	1	0	1
7	Kepala Seksi Pembangunan	1	0	1
8	Kasubbag Umum	0	1	1
9	Kasubbag Program dan Keuangan	0	1	1
10	Pelaksana	4	4	8
11	PPPK (Pengadministrasi/Operasional)	1	2	3
12	Tenaga Bantu (Naban)	3	5	8
Kelurahan Klandasan Ulu		7	5	12
1	Lurah	1	0	1
2	Sekretaris Lurah	0	0	0
3	Kepala Seksi Pemerintahan & Yanlik	1	0	1
4	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban & LH	0	0	0
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	0	1	1
6	Pelaksana	2	1	3
7	PPPK (Pengadministrasi/Operasional)	1	2	3
8	Tenaga Bantu (Naban)	2	1	3
Kelurahan Klandasan Ilir		8	4	12
1	Lurah	1	0	1
2	Sekretaris Lurah	0	0	0
3	Kepala Seksi Pemerintahan & Yanlik	0	1	1
4	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban & LH	0	0	0
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	0	1	1
6	Pelaksana	3	0	3
7	PPPK (Pengadministrasi/Operasional)	2	2	4
8	Tenaga Bantu (Naban)	2	0	2
Kelurahan Damai		4	6	10
1	Lurah	1	0	1
2	Sekretaris Lurah	0	1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan & Yanlik	0	1	1

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
4	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban & LH	1	0	1
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	0	1	1
6	Pelaksana	0	1	1
7	PPPK (Pengadministrasi/Operasional)	1	1	2
8	Tenaga Bantu (Naban)	1	1	2
<b>Kelurahan Prapatan</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
1	Lurah	1	0	1
2	Sekretaris Lurah	0	1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan & Yanlik	0	0	0
4	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban & LH	1	0	1
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0
6	Pelaksana	1	1	2
7	PPPK (Pengadministrasi/Operasional)	0	2	2
8	Tenaga Bantu (Naban)	2	1	3
<b>Kelurahan Telaga Sari</b>		<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
1	Lurah	0	1	1
2	Sekretaris Lurah	0	0	0
3	Kepala Seksi Pemerintahan & Yanlik	0	1	1
4	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban & LH	1	0	1
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0
6	Pelaksana	2	0	2
7	PPPK (Pengadministrasi/Operasional)	2	2	4
8	Tenaga Bantu (Naban)	2	0	2

Sumber : Bazeting Kecamatan Balikpapan Kota

Adapun data sumber daya manusia aparatur dapat dilihat berdasarkan golongan dan tingkat Pendidikan PNS dan PPPK di Kecamatan Balikpapan Kota sebagaimana tertuang dalam tabel/diagram berikut :

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Balikpapan Kota Berdasarkan Golongan**

Tingkat	IV		III		II		I	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Kecamatan Balikpapan Kota	2	-	6	6	1	2	-	-

Kelurahan Klandasan Ulu	-	-	2	2	2	-	-	-
Kelurahan Klandasan Ilir	-	-	4	2	-	-	-	-
Kelurahan Damai	-	-	2	4	-	-	-	-
Kelurahan Prapatan	-	-	2	2	1	-	-	-
Kelurahan Telaga Sari	-	-	2	2	1	-	-	-

**Tabel 2.3**  
**Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Balikpapan Kota**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
Kecamatan Balikpapan Kota	-	1	8	2	6	-	-
Kelurahan Klandasan Ulu	-	-	3	-	3	-	-
Kelurahan Klandasan Ilir	-	-	2	1	3	-	-
Kelurahan Damai	-	-	5	-	1	-	-
Kelurahan Prapatan	-	1	2	-	2	-	-
Kelurahan Telaga Sari	-	1	1	-	3	-	-

**Tabel 2.4**  
**Rekapitulasi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK)**  
**Kecamatan Balikpapan Kota berdasarkan Golongan**

Tingkat	V		VI		VII		IX	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Kecamatan Balikpapan Kota	1	1	-	-	-	-	-	1
Kelurahan Klandasan Ulu	1	1	-	-	-	-	-	1
Kelurahan Klandasan Ilir	1	1	-	-	-	-	1	1
Kelurahan Damai	1	1	-	-	-	-	-	1
Kelurahan Prapatan	1	1	-	-	-	-	-	1
Kelurahan Telaga Sari	1	1	-	-	-	1	1	-

**Tabel 2.5**  
**Rekapitulasi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK)**  
**Kecamatan Balikpapan Kota Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
---------	----	----	----	----	-----	-----	----

Kecamatan Balikpapan Kota	-	-	1	-	2	-	-
Kelurahan Klandasan Ulu	-	-	1	-	2	-	-
Kelurahan Klandasan Ilir	-	-	2	-	2	-	-
Kelurahan Damai	-	-	1	-	1	-	-
Kelurahan Prapatan	-	-	1	-	1	-	-
Kelurahan Telaga Sari	-	-	1	1	2	-	-

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Kecamatan Balikpapan Kota terdiri 44 Orang PNS, 18 Orang PPPK dan 20 Orang Non PNS. Untuk tingkat Pendidikan didominasi oleh kualifikasi Pendidikan D4/S1 untuk PNS dan kualifikasi Pendidikan SMA untuk PPPK.

Dengan jumlah pegawai tersebut, Kecamatan Balikpapan Kota masih mengalami kekurangan SDM. Untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Kecamatan Balikpapan Kota melakukan optimalisasi personal dengan menambah beban tugas terhadap personal yang ada dan mengusulkan tambahan pegawai ke BKPSDM Kota Balikpapan.

2. **Sarana dan Prasarana**

Untuk menunjang mobilitas pegawai dalam pelaksanaan tugas, program dan kegiatan dan untuk mendukung lancarnya pelaksanaan kegiatan pemerintahan serta pelayanan terhadap masyarakat. Sarana dan prasarana merupakan bagian penting dalam memahami perkembangan dan pertumbuhan wilayah di Kecamatan. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Balikpapan Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.6**  
**Sarana dan Prasarana Kecamatan Balikpapan Kota**

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Gedung Bangunan	7	Baik
2	Aula	2	Baik
3	Rumah Jabatan	1	Baik
4	Station Wagon	7	Baik
5	Jeep	2	RR
6	Pick Up	1	Baik
7	Sepeda Motor	25	Baik
8	A.C. Split/Window	55	Baik
	A.C. Split/Window	5	RB
9	APAR/Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	2	RB
10	alat kesehatan kerja lainnya (dst)	6	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
11	Alat Rumah Tangga Lain-lain	8	Baik
12	Brandkas/Peti Uang/Cash Box/Coin Box	2	Baik
	Brandkas/Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	RB
13	Buffet Kaca/Rak-Rak Penyimpan/Besi/Kayu	11	Baik
14	Camera Electronic/Lensa Kamera/Tustel/Handy Cam	2	Baik
	Camera Electronic/Lensa Kamera/Tustel/Handy Cam	4	RB
15	CCTV - Camera Control Television System	14	Baik
16	CPU (Peralatan Mainframe/Peralatan Personal Komputer)	2	RB
17	Dispenser	9	Baik
18	Dispenser	2	RB
19	Facsimile	1	Baik
20	Filing Cabinet Besi	10	Baik
21	Gergaji Chain Saw/Mesin Blower Listrik / Mekanik	2	RR
22	Gordyin/Kray/Vertikal Blind	49	Baik
23	Handy Talky (HT)	2	Baik
24	Karpet	2	Baik
25	Kipas Angin	7	Baik
26	Alat Komunikasi Telephone Lainnya (Tablet)	1	Baik
27	Kipas Angin	2	RB
28	Kursi Kerja/rapat/Pelayanan/Sofa	130	Baik
29	Kursi Kerja/rapat/Pelayanan/Sofa	6	RB
30	Lap Top/Note Book	35	Baik
31	Lemari Es	10	Baik
32	Lemari Besi/Metal/Kaca/Kayu/Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis/Perpustakaan	24	Baik
33	Loudspeaker	1	Baik
34	Meja kerja/Rapat/pelayanan/komputer/makan/sofa	47	Baik
	Meja kerja/Rapat/pelayanan/komputer/makan/sofa	4	RB
35	Mesin Absensi	7	Baik
	Mesin Absensi	2	RB
36	Mesin Cuci	1	Rusak
37	Mesin Fotocopy Folio	1	Baik
38	Mesin Ketik Listrik/Manual Portable/ Standard	2	RB
39	Mesin Pemotong Rumput	17	Baik
40	Mesin Penghisap Debu/Vacuum	5	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
	Cleaner/Vacum Pump		
41	Microphone/Wireless MIC	10	Baik
	Microphone/Wireless MIC	8	RB
42	Overhead Projector/Layar Film/Projector	6	Baik
	Overhead Projector/Layar Film/Projector	1	RB
43	P.C Unit/Personal Komputer/Computer Compatible/Komputer Jaringan lainnya/Distiling Apparatus	62	Baik
44	Papan Visual>Nama Instansi/Pengumuman	7	Baik
	Papan Visual>Nama Instansi/Pengumuman	3	RB
45	Peralatan studio audio lainnya (dst)	12	Baik
46	Portable Generating Set	3	RB
47	Power Amplifier	4	Baik
48	Printer/Line Printer (Peralatan Personal Komputer)	74	Baik
	Printer/Line Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	RB
49	recorder display lainnya (dst)	1	Baik
50	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	Baik
51	Sound System	6	Baik
52	Tabung Gas	8	Baik
53	Tangga Aluminium	1	Baik
54	Telephone (PABX)	11	Baik
55	Televisi/TV Monitor	11	Baik
56	Tenda	1	RB
57	Uninterruptible Power Supply (UPS)	6	RB
58	White Board	1	Baik
59	Wireless/Wireless Amplifier	2	Baik
60	Peralatan Studio Lainnya Magic 86"	6	Baik
61	Peralatan Studio Lainnya Magic 86"	6	Baik
61	Rak Besi	3	Baik
62	Rak Kayu	3	Baik
63	Tempat Tidur Besi	1	Baik
64	Tempat Tidur Kayu	3	Baik
65	Mesin Jilid	1	RB
66	Sofa	9	Baik
67	Drone	1	Baik
68	Mesin Blower Listrik	2	Baik
69	Accec Point	2	Baik
70	Tanah Lapangan Lainnya	1	Baik
71	Peta	2	RB

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
72	Kompas	1	Baik

3. **Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Kota**

Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan tertuang dalam Renstra, berdasarkan Renstra Kecamatan Balikpapan Kota periode 2021-2026 terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang diukur melalui 2 (dua) indikator sasaran.

Berdasarkan pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagaimana Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan tertuang dalam Renstra. Berikut hasil pengukuran terhadap indicator kinerja sasaran strategis tersebut



**Tabel 2.7**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Kota**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum				77,86	77,96	78,00	78,10	78,20		85,93	84,38	90,6	0	N/A	<b>110,22</b>	<b>108,18</b>	<b>116,01</b>	<b>0,00</b>
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah				n/a	69,35	69,45	69,55	69,65	n/a	63,39	69,44	70,57	0	N/A	<b>91,41</b>	<b>99,99</b>	<b>101,47</b>	<b>0,00</b>

4. **Kelompok Sasaran Pelayanan**

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan pada dasarnya mencakup semua pihak yang menjadi penerima manfaat dari fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat. Berikut pembagian Kelompok Sasaran berdasarkan Jenis Layanan Kecamatan Balikpapan Kota :

1. Warga & Penduduk
- Penduduk tetap (pemilik KTP Kota Balikpapan, domisili di Balikpapan Kota)

▪ Penduduk non-permanen (pendatang, pekerja kontrak, mahasiswa, dll)

▪ Penduduk rentan : lansia, penyandang disabilitas, anak yatim/piatu, korban bencana.

Jenis Layanan terkait : Pelayanan administrasi kependudukan (KTP dan KK ), perizinan, layanan pengaduan.

2. Kelompok Usahan & Ekonomi
- UMKM local (pedagang, pasar, warung, home industri)

▪ Pelaku usah formal (perusahaan, koperasi)

▪ Pelaku ekonomi kreatif (kuliner, kerajinan, jasa digital)

Jenis Layanan terkait : Rekomendasi usaha, fasilitasi perizinan OSS/PBG, Pembinaan UMKM

3. Komunitas & Organisasi Masyarakat
- RT dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)

▪ Karang Taruna, PKK, Posyandu

▪ Organisasi keagamaan, adat, sosial

▪ Organisasi kepemudaan (Pramuka, komunitas hobi, klub olahraga)

Jenis Layanan terkait : Fasilitasi kegiatan sosial-budaya, dukungan sarana/prasarana, pemberdayaan masyarakat, penanganan masalah sosial.

2.2 **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

a. **Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan yang muncul di Kecamatan Balikpapan Kota merupakan upaya untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan pembangunan yang perlu direspon oleh Pemerintah Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan selama lima tahun mendatang

**Tabel 2.8**  
**Permasalahan di Kecamatan Balikpapan Kota**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	PENYEBAB MASALAH
	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat serta Ketentraman dan Ketertiban di	Belum optimalnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Minimnya Sarpas Pelayanan Minimnya Kuantitas dan Kualitas SDM Belum terbangunnya integrasi pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	PENYEBAB MASALAH
	Tingkat Kecamatan Balikpapan Kota	Masih rendahnya keterlibatan komponen masyarakat dalam pembangunan	Minimnya Akses, kurangnya sosialisasi tentang pentingnya partisipasi Masyarakat dalam pembangunan
		Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif	Minimnya Akses, kurangnya sosialisasi tentang pentingnya partisipasi Masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif
		Masih tingginya kasus pencemaran lingkungan	Pengelolaan sampah yang kurang maksimal Pelanggaran Site Plant Pelanggaran Tata Ruang Warga Membuang Sampah Limbah Industri
		Kurang ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum	Keterbatasan Lahan Keterbatasan Anggaran Perencanaan kegiatan yag kurang baik
		Mobilitas Warga	Kurangnya pelayanan

**b. Isu Strategis**

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renstra sebelumnya, prediksi permasalahan dan tantangan 5 (lima) tahun ke depan, isu tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Kota, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu di tangani dan kemusian akan menjadi tugas Kecamatan Balikpapan Kota dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan sebagai berikut :

**Tabel 2.9**  
**Teknik Mentimpulkan Isu Strategis Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan**

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
	(Kewenangan PD)	(Sumber dari data capaian kinerja periode sebelumnya) Gap capaian dan ekspektasi	(KHLS RPJMD/Ranwal)	Indikator Global	Indikator Nasional	Indikator Lokal	Kesimpulan
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Masih adanya pelanggaran terhadap peraturan pemerintah	Perubahan iklim, urbanisasi/mobilitas masyarakat internasional	Pembangunan Ibukota Negara Nusantara (IKN)	Isu Strategis dalam RPJMD Kota Balikpapan : Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat Kecamatan
		Masih rendahnya keterlibatan komponen masyarakat dalam					
		Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif					
		Masih tingginya kasus Pencemaran Lingkungan					
		Kurang ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum					

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan (Kewenangan PD)	Permasalahan  (Sumber dari data capaian kinerja periode sebelumnya) Gap capaian dan ekspektasi	Isu KLHS yang Relevan  (KHLS RPJMD/Ranwal)	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
				Indikator Global	Indikator Nasional	Indikator Lokal	Kesimpulan
		Meningkatnya jumlah penduduk dan mobilitas masyarakat					
		Belum optimalnya penanganan bencana					
		Relokasi Gedung kantor kelurahan karena sudah tidak representatif					

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategis, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta factor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan yang telah dirumuskan dalam RPJMD.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Balikpapan Kota tahun 2025-2029 sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Kecamatan Balikpapan Kota**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA</b>											
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	90,6	90,61	90,62	90,63	90,64	90,65	90,66	
		Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan (%)	80	80	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	69,44	70,57	71,45	72,33	73,21	74,09	74,97	

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan proses yang terstruktur dan sistematis, dirancang untuk memastikan setiap PD memiliki peta jalan yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama lima tahun kedepan. Dokumen ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi turunan langsung dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi, dan program prioritas kepala daerah. Karena itu, setiap Langkah penyusunan Renstra PD harus diarahkan untuk mendukung fokus pembangunan daerah dan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Setiap tahap penyusunan Renstra PD memiliki keterkaitan erat dengan focus pembangunan daerah. Persiapan memastikan arah yang tepat sejak awal, rancangan awal dan rancangan Renstra membentuk kerangka strategis yang selaras dengan RPJMD, forum perangkat daerah memastikan keterlibatan public dan relevansi, rancangan akhir memformalkan target kinerja, dan penetapan menjadikannya panduan kerja yang sah. Dengan demikian, Renstra PD bukan sekedar dokumen administrative, melainkan peta jalan yang memandu seluruh gerak organisasi untuk mencapai pembangunan yang terukur, terarah, dan berdampak nyata selama lima tahun. Berikut disajikan penahapan Renstra pada Kecamatan Balikpapan Kota dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD untuk mendukung focus Pembangunan dalam RPJMD seperti pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Penahapan Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Kota**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penataan PKL dan UMKM di Terminal Balikpapan Permai, Prapatan	Pengembangan Kawasan Wisata dan Pengelolaan Sampah	Pengembangan Kawasan Wisata dan Pengelolaan Sampah	Pengembangan Kawasan Wisata dan Pengelolaan Sampah	Pengembangan Kawasan Wisata dan Pengelolaan Sampah

**3.2 Strategis dan Arah Kebijakan**

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan pertimbangan terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Balikpapan Kota dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, maka Strategi serta Arah Kebijakan yang dipilih oleh Kecamatan Balikpapan Kota sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Arah Kebijakan Kecamatan Balikpapan Kota**

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan PD	Keterangan
1	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pengembangan SPBE untuk meningkatkan kualitas pelayanan	Penguatan Pelayanan Publik	



No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan PD	Keterangan
			Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	
			Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	
			Penguatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan	
			Pengembangan Sumber Daya Manusia Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

**BAB IV**

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**

**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

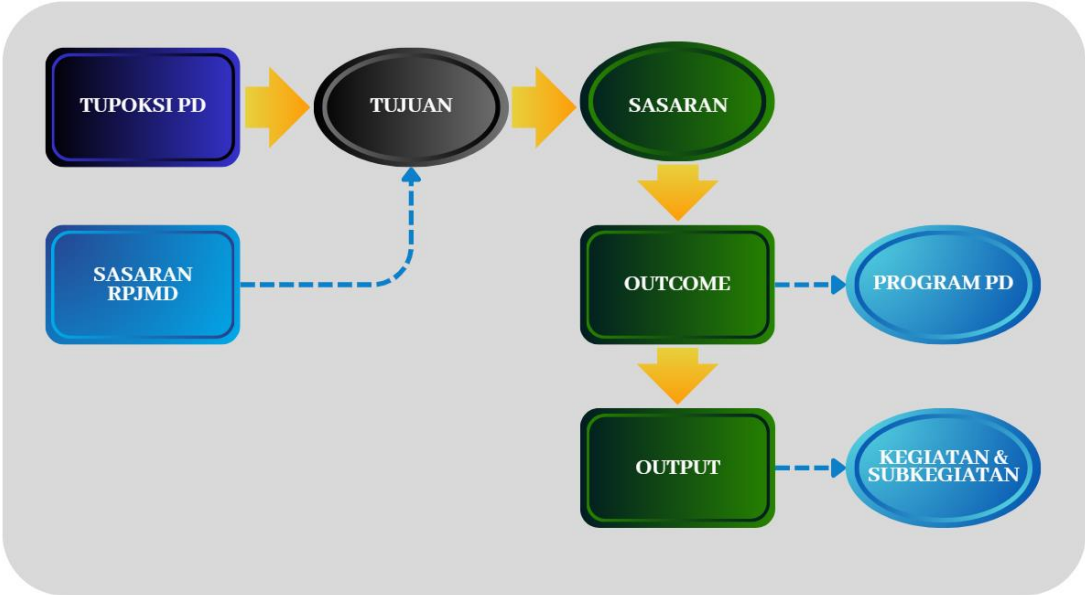
**4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja**

Program, kegiatan dan subkegiatan pada Renstra PD disusun mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Dalam Menyusun perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra, Perangkat Daerah menggunakan kerangka sebagaimana Gambar 4.1 dan perumusan yang dipaparkan pada tabel 4.1 berikut ini :

**Gambar 4.1**

**Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan**

**Renstra PD**



Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

**Tabel 4.1**  
**Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Balikpapan Kota**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA</b>							
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)		
		Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan			Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan		<b>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)</b>	<b>7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpatu Kecamatan (PATEN) yang dilayaani sesuai Standar Pelayanan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan		Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tercapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
					Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	7.01.03.2.03.0005 - Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		<b>Persentase Pengaduan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)</b>	<b>7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	
				Terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan		<b>Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)</b>	<b>7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Kebangsaan dan Ketahanan Sosial				
				Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terwujudnya profesionalisme aparatur perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terwujudnya layanan umum perkantoran perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terwujudnya operasional umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar berfungsi optimal	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
7.01.0.00.0.00.03.0001 - KELURAHAN KLANDASAN ULU							

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)		
		Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan			Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan (%)		
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan		<b>Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)</b>	<b>7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan		<b>Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)</b>	<b>7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tercapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		<b>Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)</b>	<b>7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	
				Terselenggaranya ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial		<b>Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)</b>	<b>7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0002 - KELURAHAN KLANDASAN ILIR</b>							
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan			Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan (%)		
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan		<b>Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)</b>	<b>7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan		<b>Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)</b>	<b>7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
					<b>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)</b>	<b>7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
				Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Tercapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		<b>Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)</b>	<b>7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	
				Terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial		<b>Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)</b>	<b>7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	
				Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0003 - KELURAHAN DAMAI</b>							
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan			Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan (%)		
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan		<b>Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)</b>	<b>7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan		Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Tercapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		<b>Persentase Pengaduan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)</b>	<b>7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	
				Terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial		<b>Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)</b>	<b>7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	
				Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0004 - KELURAHAN PRAPATAN</b>							
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan			Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan (%)		
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan		<b>Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)</b>	<b>7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan		<b>Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)</b>	<b>7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
					<b>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)</b>	<b>7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
				Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Tercapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		<b>Persentase Pengaduan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)</b>	<b>7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	
				Terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial		<b>Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)</b>	<b>7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	
				Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0005 - KELURAHAN TELAGA SARI</b>							
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan			Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan (%)		
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan		<b>Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)</b>	<b>7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan		<b>Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)</b>	<b>7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
					<b>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)</b>	<b>7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
				Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Tercapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial		<b>Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)</b>	<b>7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	
				Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

4.2 Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pagu Indikatif merupakan batas maksimal anggaran yang dialokasikan untuk setiap program, kegiatan, hingga sub kegiatan. Pagu indikatif ini berfungsi sebagai batas estimasi anggaran yang akan menjadi acuan penting bagi kita semua dalam merancang program, kegiatan, sub-kegiatan, agar dapat berjalan optimal dan mencapai sasaran yang diharapkan. Adapun Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta Pendanaan Kecamatan Balikpapan Kota selama periode Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 4.2  
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan beserta Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				31.363.087.000		36.198.513.000		38.008.439.000		38.768.608.000		39.931.666.000		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18.791.244.167		22.177.322.129		23.277.263.475		23.741.947.226		24.604.872.011		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	79,62	79,8	18.791.244.167	79,9	22.177.322.129	80	23.277.263.475	80,1	23.741.947.226	80,2	24.604.872.011	7.01.0.00.0.00.03.000 - KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah														
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23.242.585		23.904.714		24.599.950		24.891.949		25.389.787		
Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	23.242.585	4	23.904.714	4	24.599.950	4	24.891.949	5	25.389.787		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	3				3				3			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13.242.585		13.404.714		13.574.950		13.646.449		13.919.377		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	13.242.585	4	13.404.714	4	13.574.950	4	13.646.449	5	13.919.377		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000		10.500.000		11.025.000		11.245.500		11.470.410		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	3	10.000.000	3	10.500.000	3	11.025.000	3	11.245.500	3	11.470.410		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.496.009.0 00		12.070.410.4 30		12.699.006.1 69		12.965.724.7 97		13.624.325.1 32		
Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	75	75	10.496.009.0 00	178	12.070.410.4 30	178	12.699.006.1 69	178	12.965.724.7 97	178	13.624.325.1 32		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.496.009.0 00		12.070.410.4 30		12.699.006.1 69		12.965.724.7 97		13.624.325.1 32		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	75	75	10.496.009.0 00	178	12.070.410.4 30	178	12.699.006.1 69	178	12.965.724.7 97	178	13.624.325.1 32		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				949.587.500		997.066.875		1.046.920.21 9		1.067.858.62 3		1.089.215.79 6		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Terwujudnya profesionalisme aparaturnya perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	85	949.587.500	85	997.066.875	85	1.046.920.219	85	1.067.858.623	85	1.089.215.796		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	75	85		178		178		178		178			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				69.087.500		72.541.875		76.168.969		77.692.348		79.246.195		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	85	69.087.500	85	72.541.875	85	76.168.969	85	77.692.348	85	79.246.195		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				880.500.000		924.525.000		970.751.250		990.166.275		1.009.969.601		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	75	85	880.500.000	178	924.525.000	178	970.751.250	178	990.166.275	178	1.009.969.601		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU				
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.385.330.43 2		2.754.596.95 3		2.881.326.80 1		2.934.553.33 8		2.988.844.40 4				
Terwujudnya layanan umum perkantoran perangkat daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0	2.385.330.43 2	3	2.754.596.95 3	3	2.881.326.80 1	3	2.934.553.33 8	3	2.988.844.40 4				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12				12				12					12
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	34	38				38				38					38



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	37	19		19		19		19		19			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0		20		20		20		20			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0		100		100		100		100			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		52.500.000		55.125.000		56.227.500		57.352.050		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	50.000.000	1	52.500.000	1	55.125.000	1	56.227.500	1	57.352.050		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				546.560.889		573.888.933		602.583.380		614.635.048		626.927.749		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	34	38	546.560.889	38	573.888.933	38	602.583.380	38	614.635.048	38	626.927.749		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				897.639.768		942.521.756		989.647.844		1.009.440.80 1		1.029.629.61 7		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	37	19	897.639.768	19	942.521.756	19	989.647.844	19	1.009.440.801	19	1.029.629.617		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				183.999.775		193.199.764		202.859.752		206.916.947		211.055.286		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	12	183.999.775	12	193.199.764	12	202.859.752	12	206.916.947	12	211.055.286		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				59.130.000		62.086.500		65.190.825		66.494.642		67.824.534		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	59.130.000	12	62.086.500	12	65.190.825	12	66.494.642	12	67.824.534		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0	0	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				648.000.000		680.400.000		714.420.000		728.708.400		743.282.568		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	20	648.000.000	20	680.400.000	20	714.420.000	20	728.708.400	20	743.282.568		
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		30.000.000		31.500.000		32.130.000		32.772.600		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	0	100	30.000.000	100	31.500.000	100	32.130.000	100	32.772.600		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0	0	3	210.000.000	3	210.000.000	3	210.000.000	3	210.000.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				246.759.000		1.372.345.49 9		1.419.462.77 5		1.439.252.02 9		1.461.637.07 0		
Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	246.759.000	3	1.372.345.49 9	3	1.419.462.77 5	3	1.439.252.02 9	3	1.461.637.07 0		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	2		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		6		6		6		6			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0		3		3		3		3			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	0		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				216.759.000		227.596.950		238.976.798		243.756.333		248.631.460		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	2	216.759.000	5	227.596.950	5	238.976.798	5	243.756.333	5	248.631.460		
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	0	0	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000		

[illegible]



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		824.748.549		860.485.977		875.495.696		893.005.610		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	6	824.748.549	6	860.485.977	6	875.495.696	6	893.005.610		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.908.068.15 0		3.053.471.55 8		3.206.145.15 5		3.270.268.03 8		3.335.673.39 9		
Terwujudnya operasional umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.908.068.15 0	36	3.053.471.55 8	36	3.206.145.15 5	36	3.270.268.03 8	36	3.335.673.39 9		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	26	26		26		26		26		26			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				648.735.300		681.172.065		715.230.688		729.535.282		744.125.987		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	648.735.300	36	681.172.065	36	715.230.688	36	729.535.282	36	744.125.987		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.259.332.85 0		2.372.299.49 3		2.490.914.46 7		2.540.732.75 6		2.591.547.41 2		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	26	26	2.259.332.85 0	26	2.372.299.49 3	26	2.490.914.46 7	26	2.540.732.75 6	26	2.591.547.41 2		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.782.247.50 0		1.905.526.10 0		1.999.802.40 6		2.039.398.45 2		2.079.786.42 3		
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar berfungsi optimal	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	1.782.247.50 0	3	1.905.526.10 0	3	1.999.802.40 6	3	2.039.398.45 2	3	2.079.786.42 3		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		6		6		6		6			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6		0		0		0		0			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	165	171		171		171		171		171			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	34	70		70		70		70		70			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	36		36		36		36		36			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0	0		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				234.934.800		246.681.540		259.015.617		264.195.929		269.479.848		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	34	70	234.934.800	70	246.681.540	70	259.015.617	70	264.195.929	70	269.479.848		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				416.688.200		437.522.610		459.398.741		468.586.715		477.958.450		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	36	416.688.200	36	437.522.610	36	459.398.741	36	468.586.715	36	477.958.450		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				148.700.000		156.135.000		163.941.750		167.220.585		170.564.997		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	165	171	148.700.000	171	156.135.000	171	163.941.750	171	167.220.585	171	170.564.997		
7.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				698.600.000		733.530.000		770.206.500		785.610.630		801.322.843		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi (Unit)	6	6	698.600.000	6	733.530.000	6	770.206.500	6	785.610.630	6	801.322.843		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				283.324.500		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi (Unit)	6	6	283.324.500	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		311.656.950		327.239.798		333.784.593		340.460.285		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi (Unit)	0	0	0	6	311.656.950	6	327.239.798	6	333.784.593	6	340.460.285		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.186.827.80 0		1.340.415.50 0		1.408.633.35 9		1.436.806.02 6		1.465.542.14 7		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	1.186.827.80 0	100	1.340.415.50 0	100	1.408.633.35 9	100	1.436.806.02 6	100	1.465.542.14 7	7.01.0.00.0.00.03.0 000 - KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				471.000.800		548.100.800		575.505.924		587.016.042		598.756.363		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	3	6	471.000.800	6	548.100.800	6	575.505.924	6	587.016.042	6	598.756.363		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				471.000.800		548.100.800		575.505.924		587.016.042		598.756.363		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	3	6	471.000.800	6	548.100.800	6	575.505.924	6	587.016.042	6	598.756.363		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				90.000.000		94.500.000		99.225.000		101.209.500		103.233.690		
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpatu Kecamatan (PATEN) yang dilayaani sesuai Standar Pelayanan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	200	210	90.000.000	210	94.500.000	210	99.225.000	210	101.209.500	210	103.233.690		
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				90.000.000		94.500.000		99.225.000		101.209.500		103.233.690		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	200	210	90.000.000	210	94.500.000	210	99.225.000	210	101.209.500	210	103.233.690		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	100	100	1.186.827.80 0	100	1.340.415.50 0	100	1.408.633.35 9	100	1.436.806.02 6	100	1.465.542.14 7	7.01.0.00.0.00.03.0 001 - KELURAHAN KLANDASAN ULU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				105.450.000		125.400.000		132.867.000		135.524.340		138.234.827		
Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	4	105.450.000	4	125.400.000	4	132.867.000	4	135.524.340	4	138.234.827		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				105.450.000		125.400.000		132.867.000		135.524.340		138.234.827		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	4	105.450.000	4	125.400.000	4	132.867.000	4	135.524.340	4	138.234.827		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	100	100	1.186.827.80 0	100	1.340.415.50 0	100	1.408.633.35 9	100	1.436.806.02 6	100	1.465.542.14 7	7.01.0.00.0.00.03.0 002 - KELURAHAN KLANDASAN ILIR	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				121.335.000		133.468.500		140.141.925		142.944.764		145.803.659		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	2	121.335.000	2	133.468.500	2	140.141.925	2	142.944.764	2	145.803.659		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				121.335.000		133.468.500		140.141.925		142.944.764		145.803.659		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	2	121.335.000	2	133.468.500	2	140.141.925	2	142.944.764	2	145.803.659		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	100	100	1.186.827.80 0	100	1.340.415.50 0	100	1.408.633.35 9	100	1.436.806.02 6	100	1.465.542.14 7	7.01.0.00.0.00.03.0 003 - KELURAHAN DAMAI	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan  Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				128.962.000		141.858.200		148.951.110		151.930.132		154.968.735		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	2	128.962.000	2	141.858.200	2	148.951.110	2	151.930.132	2	154.968.735		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				128.962.000		141.858.200		148.951.110		151.930.132		154.968.735		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	2	128.962.000	2	141.858.200	2	148.951.110	2	151.930.132	2	154.968.735		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	100	100	1.186.827.80 0	100	1.340.415.50 0	100	1.408.633.35 9	100	1.436.806.02 6	100	1.465.542.14 7	7.01.0.00.0.00.03.0 004 - KELURAHAN PRAPATAN	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				125.840.000		138.424.000		145.345.200		148.252.104		151.217.146		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	2	125.840.000	2	138.424.000	2	145.345.200	2	148.252.104	2	151.217.146		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				125.840.000		138.424.000		145.345.200		148.252.104		151.217.146		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	2	125.840.000	2	138.424.000	2	145.345.200	2	148.252.104	2	151.217.146		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	100	100	1.186.827.80 0	100	1.340.415.50 0	100	1.408.633.35 9	100	1.436.806.02 6	100	1.465.542.14 7	7.01.0.00.0.00.03.0 005 - KELURAHAN TELAGA SARI	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				144.240.000		158.664.000		166.597.200		169.929.144		173.327.727		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	2	144.240.000	2	158.664.000	2	166.597.200	2	169.929.144	2	173.327.727		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat				144.240.000		158.664.000		166.597.200		169.929.144		173.327.727		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	2	144.240.000	2	158.664.000	2	166.597.200	2	169.929.144	2	173.327.727		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				10.364.015.0 33		11.601.885.3 71		12.189.747.6 66		12.434.363.5 58		12.682.650.8 28		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	24,76	27,5	10.364.015.0 33	29	11.601.885.3 71	30,5	12.189.747.6 66	32	12.434.363.5 58	32,1	12.682.650.8 28	7.01.0.00.0.00.03.0 000 - KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	98,83	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				183.999.300		199.799.265		209.789.228		213.985.013		218.264.713		
Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	1	3	183.999.300	3	199.799.265	3	209.789.228	3	213.985.013	3	218.264.713		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	50	50			50		50		50		50		
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				110.000.000		122.100.000		128.205.000		130.769.100		133.384.482		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	50	50	110.000.000	50	122.100.000	50	128.205.000	50	130.769.100	50	133.384.482		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				73.999.300		77.699.265		81.584.228		83.215.913		84.880.231		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	1	3	73.999.300	3	77.699.265	3	81.584.228	3	83.215.913	3	84.880.231		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.314.924.34 0		2.584.172.06 9		2.712.380.67 2		2.766.228.28 5		2.821.152.85 1		
Tercapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	0	0	2.314.924.34 0	2	2.584.172.06 9	2	2.712.380.67 2	2	2.766.228.28 5	2	2.821.152.85 1		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	2	2				2		2		2			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	2	2				3		3		3			3

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	0	0		229		229		229		229			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				566.942.320		629.305.975		660.771.274		673.986.699		687.466.433		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	2	2	566.942.320	3	629.305.975	3	660.771.274	3	673.986.699	3	687.466.433		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	0	0	0	229	10.000.000	229	10.000.000	229	10.000.000	229	10.000.000		
7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1.658.082.87 0		1.840.471.98 6		1.932.495.58 5		1.971.145.49 7		2.010.568.40 7		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	2	2	1.658.082.87 0	2	1.840.471.98 6	2	1.932.495.58 5	2	1.971.145.49 7	2	2.010.568.40 7		
7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				89.899.150		94.394.108		99.113.813		101.096.089		103.118.011		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	1	89.899.150	1	94.394.108	1	99.113.813	1	101.096.089	1	103.118.011		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	24,76	27,5	10.364.015.0 33	29	11.601.885.3 71	30,5	12.189.747.6 66	32	12.434.363.5 58	32,1	12.682.650.8 28	7.01.0.00.0.00.03.0 001 - KELURAHAN KLANDASAN ULU	
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	98,83	100				100				100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				641.871.990		802.540.500		851.435.550		869.685.201		887.078.905		
Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	53	57	641.871.990	57	802.540.500	57	851.435.550	57	869.685.201	57	887.078.905		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	60	60		60		60		60		60			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				23.771.990		117.049.500		131.670.000		135.524.340		138.234.827		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	60	60	23.771.990	60	117.049.500	60	131.670.000	60	135.524.340	60	138.234.827		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				573.100.000		636.141.000		667.948.050		681.307.011		694.933.151		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	53	57	573.100.000	57	636.141.000	57	667.948.050	57	681.307.011	57	694.933.151		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				35.000.000		38.850.000		40.792.500		41.608.350		42.440.517		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2	35.000.000	2	38.850.000	2	40.792.500	2	41.608.350	2	42.440.517		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				10.000.000		10.500.000		11.025.000		11.245.500		11.470.410		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.025.000	1	11.245.500	1	11.470.410		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				876.703.128		973.140.472		1.021.797.49 6		1.042.233.44 6		1.063.078.11 5		
Tercapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	44	44	876.703.128	44	973.140.472	44	1.021.797.49 6	44	1.042.233.44 6	44	1.063.078.11 5		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				876.703.128		973.140.472		1.021.797.49 6		1.042.233.44 6		1.063.078.11 5		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	44	44	876.703.128	44	973.140.472	44	1.021.797.49 6	44	1.042.233.44 6	44	1.063.078.11 5		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	24,76	27,5	10.364.015.0 33	29	11.601.885.3 71	30,5	12.189.747.6 66	32	12.434.363.5 58	32,1	12.682.650.8 28	7.01.0.00.0.00.03.0 002 - KELURAHAN KLANDASAN ILIR	
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	98,83	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				651.250.000		722.287.500		758.401.875		773.569.913		789.041.311		
Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2	651.250.000	2	722.287.500	2	758.401.875	2	773.569.913	2	789.041.311		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	97	60		60		60		60		60			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	85	85		85		85		85		85			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				33.150.000		36.796.500		38.636.325		39.409.052		40.197.233		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	85	85	33.150.000	85	36.796.500	85	38.636.325	85	39.409.052	85	40.197.233		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				573.100.000		636.141.000		667.948.050		681.307.011		694.933.151		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	97	60	573.100.000	60	636.141.000	60	667.948.050	60	681.307.011	60	694.933.151		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				35.000.000		38.850.000		40.792.500		41.608.350		42.440.517		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2	35.000.000	2	38.850.000	2	40.792.500	2	41.608.350	2	42.440.517		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				10.000.000		10.500.000		11.025.000		11.245.500		11.470.410		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.025.000	1	11.245.500	1	11.470.410		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.272.373.00 0		1.412.334.03 0		1.482.950.73 2		1.512.609.74 6		1.542.861.94 1		
Tercapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	66	66	1.272.373.00 0	66	1.412.334.03 0	66	1.482.950.73 2	66	1.512.609.74 6	66	1.542.861.94 1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.272.373.00 0		1.412.334.03 0		1.482.950.73 2		1.512.609.74 6		1.542.861.94 1		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	66	66	1.272.373.00 0	66	1.412.334.03 0	66	1.482.950.73 2	66	1.512.609.74 6	66	1.542.861.94 1		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	98,83	100	10.364.015.0 33	100	11.601.885.3 71	100	12.189.747.6 66	100	12.434.363.5 58	100	12.682.650.8 28	7.01.0.00.0.00.03.0 003 - KELURAHAN DAMAI	
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	24,76	27,5		29		30,5		32		32,1			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				639.899.695		709.688.661		745.173.095		760.076.556		775.278.087		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2	639.899.695	2	709.688.661	2	745.173.095	2	760.076.556	2	775.278.087			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	70	70				70				70				
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1				1				1				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	43	24				24				24				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				21.799.695		24.197.661		25.407.545		25.915.695		26.434.009		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	70	70	21.799.695	70	24.197.661	70	25.407.545	70	25.915.695	70	26.434.009		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				573.100.000		636.141.000		667.948.050		681.307.011		694.933.151		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	43	24	573.100.000	24	636.141.000	24	667.948.050	24	681.307.011	24	694.933.151		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				35.000.000		38.850.000		40.792.500		41.608.350		42.440.517		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2	35.000.000	2	38.850.000	2	40.792.500	2	41.608.350	2	42.440.517		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				10.000.000		10.500.000		11.025.000		11.245.500		11.470.410		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.025.000	1	11.245.500	1	11.470.410		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				778.363.980		863.984.018		907.183.219		925.326.883		943.833.421		
Tercapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	40	40	778.363.980	40	863.984.018	40	907.183.219	40	925.326.883	40	943.833.421		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				778.363.980		863.984.018		907.183.219		925.326.883		943.833.421		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	40	40	778.363.980	40	863.984.018	40	907.183.219	40	925.326.883	40	943.833.421		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	98,83	100	10.364.015.0 33	100	11.601.885.3 71	100	12.189.747.6 66	100	12.434.363.5 58	100	12.682.650.8 28	7.01.0.00.0.00.03.0 004 - KELURAHAN PRAPATAN	
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	24,76	27,5		29		30,5		32		32,1			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				639.897.500		709.686.225		745.170.536		760.073.947		775.275.426		
Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	54	54	639.897.500	54	709.686.225	54	745.170.536	54	760.073.947	54	775.275.426		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	86	65		65		65		65		65			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2		2		2		2		2			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				21.797.500		24.195.225		25.404.986		25.913.086		26.431.348		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	54	54	21.797.500	54	24.195.225	54	25.404.986	54	25.913.086	54	26.431.348		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				573.100.000		636.141.000		667.948.050		681.307.011		694.933.151		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	86	65	573.100.000	65	636.141.000	65	667.948.050	65	681.307.011	65	694.933.151		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				35.000.000		38.850.000		40.792.500		41.608.350		42.440.517		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2	35.000.000	2	38.850.000	2	40.792.500	2	41.608.350	2	42.440.517		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				10.000.000		10.500.000		11.025.000		11.245.500		11.470.410		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.025.000	1	11.245.500	1	11.470.410		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				781.486.000		867.449.460		910.821.933		929.038.372		947.619.139		
Tercapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	40	40	781.486.000	40	867.449.460	40	910.821.933	40	929.038.372	40	947.619.139		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				781.486.000		867.449.460		910.821.933		929.038.372		947.619.139		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	40	40	781.486.000	40	867.449.460	40	910.821.933	40	929.038.372	40	947.619.139		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	98,83	100	10.364.015.0 33	100	11.601.885.3 71	100	12.189.747.6 66	100	12.434.363.5 58	100	12.682.650.8 28	7.01.0.00.0.00.03.0 005 - KELURAHAN TELAGA SARI	
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	24,76	27,5		29		30,5		32		32,1			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				643.797.460		714.015.181		749.715.940		764.710.258		780.004.463		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	80	80	643.797.460	80	714.015.181	80	749.715.940	80	764.710.258	80	780.004.463		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	107	31		31		31		31		31			
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2		2		2		2		2			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				25.697.460		28.524.181		29.950.390		30.549.397		31.160.385		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	80	80	25.697.460	80	28.524.181	80	29.950.390	80	30.549.397	80	31.160.385		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				573.100.000		636.141.000		667.948.050		681.307.011		694.933.151		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	107	31	573.100.000	31	636.141.000	31	667.948.050	31	681.307.011	31	694.933.151		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				35.000.000		38.850.000		40.792.500		41.608.350		42.440.517		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2	35.000.000	2	38.850.000	2	40.792.500	2	41.608.350	2	42.440.517		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				10.000.000		10.500.000		11.025.000		11.245.500		11.470.410		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.025.000	1	11.245.500	1	11.470.410		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				939.448.640		1.042.787.99 0		1.094.927.39 0		1.116.825.93 8		1.139.162.45 6		
Tercapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	49	49	939.448.640	49	1.042.787.99 0	49	1.094.927.39 0	49	1.116.825.93 8	49	1.139.162.45 6		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				939.448.640		1.042.787.99 0		1.094.927.39 0		1.116.825.93 8		1.139.162.45 6		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	49	49	939.448.640	49	1.042.787.99 0	49	1.094.927.39 0	49	1.116.825.93 8	49	1.139.162.45 6		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				781.000.000		826.890.000		868.234.500		885.599.190		903.311.174		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	781.000.000	100	826.890.000	100	868.234.500	100	885.599.190	100	903.311.174	7.01.0.00.0.00.03.0 000 - KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				114.000.000		126.540.000		132.867.000		135.524.340		138.234.827		
Terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	14	114.000.000	14	126.540.000	14	132.867.000	14	135.524.340	14	138.234.827		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				114.000.000		126.540.000		132.867.000		135.524.340		138.234.827		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	14	114.000.000	14	126.540.000	14	132.867.000	14	135.524.340	14	138.234.827		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan				157.000.000		164.850.000		173.092.500		176.554.350		180.085.437		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Peraturan Kepala Daerah														
Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	15	157.000.000	15	164.850.000	15	173.092.500	15	176.554.350	15	180.085.437		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				157.000.000		164.850.000		173.092.500		176.554.350		180.085.437		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	0	15	157.000.000	15	164.850.000	15	173.092.500	15	176.554.350	15	180.085.437		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Kepolisian Negara Republik Indonesia	Republik Indonesia (Laporan)													
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	781.000.000	100	826.890.000	100	868.234.500	100	885.599.190	100	903.311.174	7.01.0.00.0.00.03.0 001 - KELURAHAN KLANDASAN ULU	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				50.000.000		52.500.000		55.125.000		56.227.500		57.352.050		
Terselenggaranya ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	16	50.000.000	15	52.500.000	15	55.125.000	15	56.227.500	15	57.352.050		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				50.000.000		52.500.000		55.125.000		56.227.500		57.352.050		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	16	50.000.000	15	52.500.000	15	55.125.000	15	56.227.500	15	57.352.050		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				52.000.000		54.600.000		57.330.000		58.476.600		59.646.132		
Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	52.000.000	14	54.600.000	14	57.330.000	14	58.476.600	14	59.646.132		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau				52.000.000		54.600.000		57.330.000		58.476.600		59.646.132		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Kepolisian Negara Republik Indonesia														
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	52.000.000	14	54.600.000	14	57.330.000	14	58.476.600	14	59.646.132		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	781.000.000	100	826.890.000	100	868.234.500	100	885.599.190	100	903.311.174	7.01.0.00.0.00.03.0 002 - KELURAHAN KLANDASAN ILIR	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				50.000.000		52.500.000		55.125.000		56.227.500		57.352.050		
Terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	0	16	50.000.000	15	52.500.000	15	55.125.000	15	56.227.500	15	57.352.050		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
	Kecamatan (Laporan)													
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				50.000.000		52.500.000		55.125.000		56.227.500		57.352.050		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	16	50.000.000	15	52.500.000	15	55.125.000	15	56.227.500	15	57.352.050		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				52.000.000		54.600.000		57.330.000		58.476.600		59.646.132		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	52.000.000	14	54.600.000	14	57.330.000	14	58.476.600	14	59.646.132		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				52.000.000		54.600.000		57.330.000		58.476.600		59.646.132		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	52.000.000	14	54.600.000	14	57.330.000	14	58.476.600	14	59.646.132		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	781.000.000	100	826.890.000	100	868.234.500	100	885.599.190	100	903.311.174	7.01.0.00.0.00.03.0 003 - KELURAHAN DAMAI	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				50.000.000		52.500.000		55.125.000		56.227.500		57.352.050		
Terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	16	50.000.000	15	52.500.000	15	55.125.000	15	56.227.500	15	57.352.050		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				50.000.000		52.500.000		55.125.000		56.227.500		57.352.050		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	0	16	50.000.000	15	52.500.000	15	55.125.000	15	56.227.500	15	57.352.050		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
	Kecamatan (Laporan)													
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				52.000.000		54.600.000		57.330.000		58.476.600		59.646.132		
Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	52.000.000	14	54.600.000	14	57.330.000	14	58.476.600	14	59.646.132		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				52.000.000		54.600.000		57.330.000		58.476.600		59.646.132		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	52.000.000	14	54.600.000	14	57.330.000	14	58.476.600	14	59.646.132		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	781.000.000	100	826.890.000	100	868.234.500	100	885.599.190	100	903.311.174	7.01.0.00.0.00.03.0004 - KELURAHAN PRAPATAN	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				50.000.000		52.500.000		55.125.000		56.227.500		57.352.050		
Terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	16	50.000.000	15	52.500.000	15	55.125.000	15	56.227.500	15	57.352.050		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				50.000.000		52.500.000		55.125.000		56.227.500		57.352.050		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	16	50.000.000	15	52.500.000	15	55.125.000	15	56.227.500	15	57.352.050		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				52.000.000		54.600.000		57.330.000		58.476.600		59.646.132		
Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	52.000.000	14	54.600.000	14	57.330.000	14	58.476.600	14	59.646.132		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				52.000.000		54.600.000		57.330.000		58.476.600		59.646.132		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	52.000.000	14	54.600.000	14	57.330.000	14	58.476.600	14	59.646.132		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentrman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentrman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	781.000.000	100	826.890.000	100	868.234.500	100	885.599.190	100	903.311.174	7.01.0.00.0.00.03.0 005 - KELURAHAN TELAGA SARI	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				50.000.000		52.500.000		55.125.000		56.227.500		57.352.050		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	16	50.000.000	15	52.500.000	15	55.125.000	15	56.227.500	15	57.352.050		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				50.000.000		52.500.000		55.125.000		56.227.500		57.352.050		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	16	50.000.000	15	52.500.000	15	55.125.000	15	56.227.500	15	57.352.050		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				52.000.000		54.600.000		57.330.000		58.476.600		59.646.132		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	52.000.000	14	54.600.000	14	57.330.000	14	58.476.600	14	59.646.132		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				52.000.000		54.600.000		57.330.000		58.476.600		59.646.132		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	52.000.000	14	54.600.000	14	57.330.000	14	58.476.600	14	59.646.132		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				240.000.000		252.000.000		264.560.000		269.892.000		275.289.840		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	240.000.000	100	252.000.000	100	264.560.000	100	269.892.000	100	275.289.840	7.01.0.00.0.00.03.0 000 - KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				65.000.000		68.250.000		71.622.500		73.095.750		74.557.665		
Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	0	100	65.000.000	100	68.250.000	100	71.622.500	100	73.095.750	100	74.557.665		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				65.000.000		68.250.000		71.622.500		73.095.750		74.557.665		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	100	65.000.000	100	68.250.000	100	71.622.500	100	73.095.750	100	74.557.665		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	240.000.000	100	252.000.000	100	264.560.000	100	269.892.000	100	275.289.840	7.01.0.00.0.00.03.0 001 - KELURAHAN KLANDASAN ULU	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				35.000.000		36.750.000		38.587.500		39.359.250		40.146.435		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	75	35.000.000	75	36.750.000	75	38.587.500	75	39.359.250	75	40.146.435		
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka				35.000.000		36.750.000		38.587.500		39.359.250		40.146.435		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	75	35.000.000	75	36.750.000	75	38.587.500	75	39.359.250	75	40.146.435		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	240.000.000	100	252.000.000	100	264.560.000	100	269.892.000	100	275.289.840	7.01.0.00.0.00.03.0002 - KELURAHAN KLANDASAN ILIR	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				35.000.000		36.750.000		38.587.500		39.359.250		40.146.435		
Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	64	35.000.000	64	36.750.000	64	38.587.500	64	39.359.250	64	40.146.435		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				35.000.000		36.750.000		38.587.500		39.359.250		40.146.435		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	0	64	35.000.000	64	36.750.000	64	38.587.500	64	39.359.250	64	40.146.435		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Kesatuan Republik Indonesia	Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	240.000.000	100	252.000.000	100	264.560.000	100	269.892.000	100	275.289.840	7.01.0.00.0.00.03.0 003 - KELURAHAN DAMAI	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				35.000.000		36.750.000		38.587.500		39.359.250		40.146.435		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	38	35.000.000	56	36.750.000	56	38.587.500	56	39.359.250	56	40.146.435		
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka				35.000.000		36.750.000		38.587.500		39.359.250		40.146.435		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	38	35.000.000	56	36.750.000	56	38.587.500	56	39.359.250	56	40.146.435		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	240.000.000	100	252.000.000	100	264.560.000	100	269.892.000	100	275.289.840	7.01.0.00.0.00.03.0004 - KELURAHAN PRAPATAN	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				35.000.000		36.750.000		38.587.500		39.359.250		40.146.435		
Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	56	35.000.000	56	36.750.000	56	38.587.500	56	39.359.250	56	40.146.435		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				35.000.000		36.750.000		38.587.500		39.359.250		40.146.435		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	0	56	35.000.000	56	36.750.000	56	38.587.500	56	39.359.250	56	40.146.435		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Kesatuan Republik Indonesia	Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	240.000.000	100	252.000.000	100	264.560.000	100	269.892.000	100	275.289.840	7.01.0.00.0.00.03.0 005 - KELURAHAN TELAGA SARI	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				35.000.000		36.750.000		38.587.500		39.359.250		40.146.435		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	70	35.000.000	70	36.750.000	70	38.587.500	70	39.359.250	70	40.146.435		
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka				35.000.000		36.750.000		38.587.500		39.359.250		40.146.435		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	70	35.000.000	70	36.750.000	70	38.587.500	70	39.359.250	70	40.146.435		

4.3 Program Pendukung Prioritas

Berdasarkan strategis dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3  
Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas  
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
2.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
3.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
4.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
7.01.0.00.0.00.03.0001 - KELURAHAN KLANDASAN ULU				
5.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
6.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
7.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
8.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			7.01.0.00.0.00.03.0002 - KELURAHAN KLANDASAN ILIR	
9.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
10.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			11.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
12.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			7.01.0.00.0.00.03.0003 - KELURAHAN DAMAI	
13.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
14.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
15.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
16.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	PEMERINTAHAN UMUM	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0004 - KELURAHAN PRAPATAN</b>				
17.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
18.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
19.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
20.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
		Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0005 - KELURAHAN TELAGA SARI</b>				
21.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
22.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
23.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
24.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
		Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

#### 4.4 Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Perangkat Daerah

Pada Periode perencanaan sebelumnya yaitu Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2021-2026, Kecamatan Balikpapan Kota belum menetapkan Indikator Kinerj Daerah (IKD) secara formal sebagai alat ukur pencapaian kinerja daerah pada tingkat kecamatan. Hal ini dikarenakan belum adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur kewajiban penyusunan IKD pada level Kecamatan, serta keterbatasan sistem pengukuran kinerja yang tersedia saat itu.

Namun seiring dengan perkembangan regulasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah termasuk pada level kecamatan, maka pada periode perencanaan tahun 2026-2030, Kecamatan Balikpapan Kota telah menetapkan dan mengintegrasikan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai bahan dari upaya mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang lebih transparan, terukur, dan berorientasi hasil (result-based management).

Penyusunan IKD ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan perlu indikator kinerja yang terukur dalam setiap dokumen perencanaan pembangunan.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029 dirumuskan untuk :

1. Mengukur capaian tujuan dan sasaran pembangunan kecamatan, sebagaimana tertuang dalam visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah.
2. Menjadi alat evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan secara lebih sistematis dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan akuntabilitasi kinerja perangkat daerah, khususnya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara efektif dan efisien.
4. Mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan secara keseluruhan, melalui kontribusi nyata pembangunan di tingkat kecamatan.

Dalam dokumen Renstra ini, IKD disusun berdasarkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound), dan dijabarkan secara langsung dalam tabel sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Kota. Adapun IKD ditetapkan mencerminkan hasil-hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada kecamatan, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

Dengan ditetapkannya IKD dalam Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029, diharapkan pelaksanaan pembangunan diwilayah Kecamatan dapat lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat, serta mendukung pencapaian visi Kota Balikpapan sebagai Kota yang berkelanjutan, cerdas, dan berdaya saing.

Dalam melaksanakan kinerja di bidang Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel telah ditetapkan indikator kinerjanya sebagai tolak ukur keberhasilan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Kota dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan urusan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Kota yang telah ditentukan dalam kurun waktu 2025-2029 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.4**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Balikpapan Kota**

N O	INDIKATOR	SATU AN	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERAN GAN
				202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	203 0	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.03 .0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA									
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	90,6	90,6 1	90,6 2	90,6 3	90,6 4	90,6 5	90,6 6	
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	69,44	70,5 7	71,4 5	72,3 3	73,2 1	74,0 9	74,9 7	
4.	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	%	80	80	100	100	100	100	100	

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Kunci**  
**Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029**

N O	INDIKATOR	STAT US	SATU AN	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERAN GAN
					202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	203 0	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	7.01 - KECAMATA N										
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	positif	Indek s	90,6	90, 61	90, 62	90, 63	90, 64	90, 65	90, 66	
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	positif	Nilai	69,44	70, 57	71, 45	72, 33	73, 21	74, 09	74, 97	
4.	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkemban g di Tingkat Kecamatan	positif	%	80	80	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Pengaduan Ketentrama n dan Ketertiban Umum yang ditindaklanj uti		%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase Koordinasi Penyelengga raan Pemerintah an dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanj uti		%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	positif	Indek s	79,62	79, 7	79, 8	79, 9	80	80, 1	80, 2	
8.	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial		%	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangun an sarana dan prasarana serta pemberdaya an masyarakat di wilayah kecamatan		%	24,76	26	27, 5	29	30, 5	32	32, 1	



N O	INDIKATOR	STAT US	SATU AN	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERAN GAN
					202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	203 0	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1 0.	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan		%	98,83	98,83	100	100	100	100	100	

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029 ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029 Urusan Kewilayahan. Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya bahwa Renstra SKPD ini disusun dengan mempertimbangkan Aspek Legalitas, Aspek Perimbangan Kewenangan Pusat dan Daerah terutama dalam era otonomi pembangunan dan aspek perencanaan strategis, dikemukakan pula Visi, Misi dan selanjutnya dirumuskan kedalam prioritas kebijakan pembangunan, serta melalui penetapan Tujuan, Strategi, Sasaran, Kebijakan, dan Program Pembangunan.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pemerintah Kota Balikpapan untuk tercapainya sasaran Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Kalimantan Timur. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Balikpapan Kota ini akan menjadi acuan dalam Penilaian Kinerja Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan dalam 5 tahun ke depan. Semoga upaya Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan dalam 5 tahun dapat lebih terarah dan terukur.

Harus diperhatikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Balikpapan Kota merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Balikpapan Kota.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah serta Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan. Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan target kinerja Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan, maka setiap perangkat daerah, termasuk Kecamatan Balikpapan Utara, berkewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerjanya.

Renstra Kecamatan Balikpapan Utara disusun mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Sebagai unit kerja perangkat daerah yang menjalankan sebagian kewenangan Wali Kota di tingkat wilayah, Kecamatan Balikpapan Utara memiliki posisi strategis dalam memastikan sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dengan dinamika kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan. Oleh karena itu, penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2026–2030 dilakukan secara sistematis dan partisipatif, dengan mempertimbangkan kondisi aktual wilayah, potensi lokal, isu-isu strategis, serta hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya.

Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) kecamatan serta menjadi instrumen pengukuran kinerja aparatur kecamatan dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan seluruh jajaran Kecamatan Balikpapan Utara dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih terarah, terukur, dan akuntabel guna mendukung

pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Balikpapan secara keseluruhan.

## 1.2 **DASAR HUKUM**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025-2029 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

- 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 12) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 18) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 19) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
- 20) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 20);

- 21) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 54);
- 22) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2045;
- 23) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029;
- 24) Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 57).

### 1.3 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, serta hambatan yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program dengan mengantisipasi perkembangan masa depan;
2. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang lazim disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Utara;
3. Sebagai barometer hasil kinerja pemerintah Kecamatan Balikpapan Utara.

Tujuan dari Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, diantaranya sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Kecamatan Balikpapan Utara untuk kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
2. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Balikpapan Utara dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029;

#### 1.4 **SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2025-2029 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat:

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika Penulisan;

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat:

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daaerah, yang memuat:
  - a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah;
  - b. Sumber Daya Perangkat Daerah;
  - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
  - d. Kelompok Sasaran Layanan.
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, yang memuat:
  - a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan
  - b. Isu Strategis

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat:

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;



4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

#### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat:

1. Uraian program;
2. Uraian kegiatan;
3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif;
4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra pd tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK).

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substansial, kadiah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

##### a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Kecamatan Balikpapan Utara, merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Balikpapan yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Kecamatan Balikpapan Utara dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan sebagian tugas Camat dilaksanakan oleh Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan. Kelurahan berkedudukan di bawah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Kecamatan Balikpapan Utara mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota dan tugas pemerintahan lainnya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Utara mengacu pada Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, sesuai pasal 5, Camat menyelenggarakan fungsi:

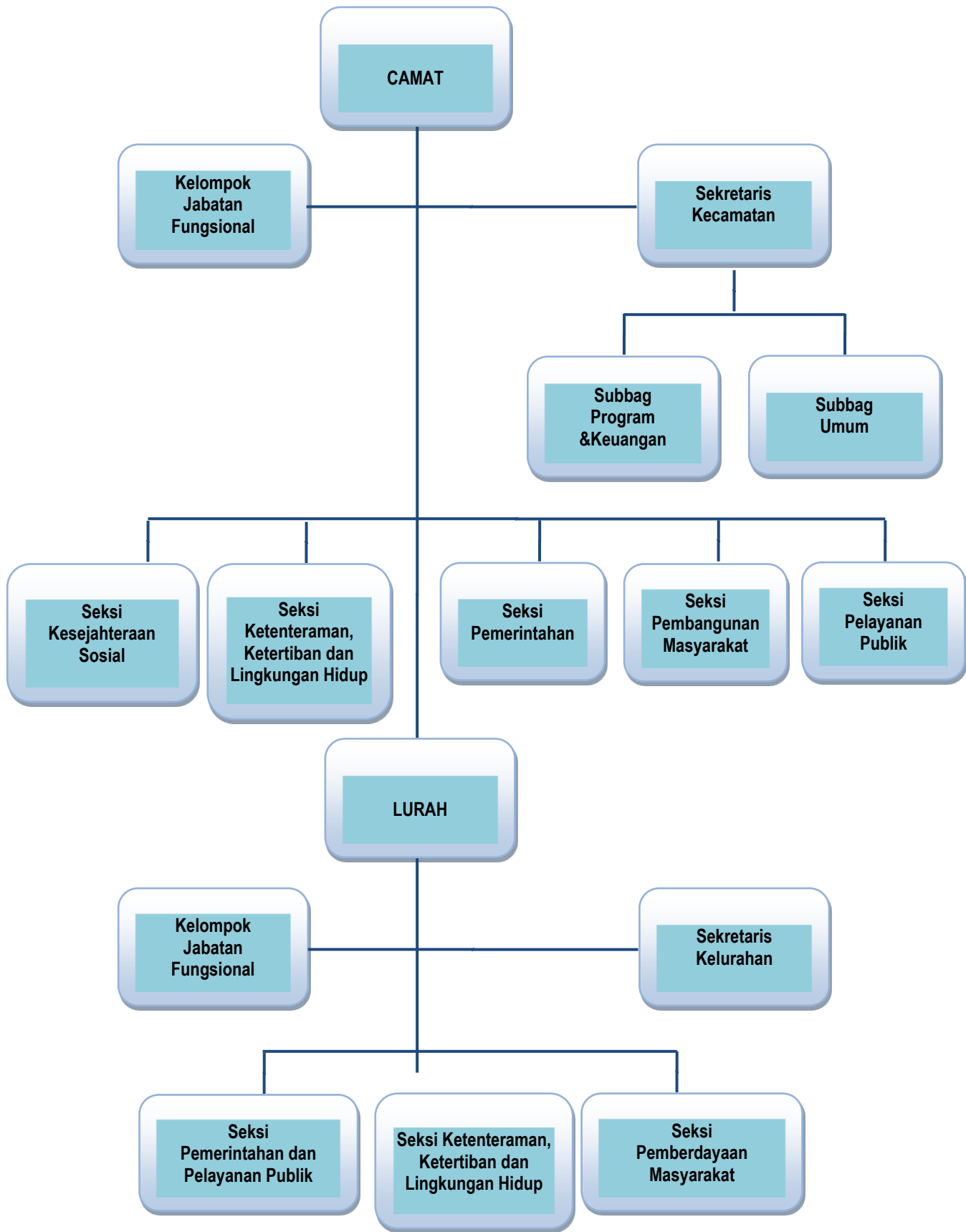
- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- 2) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
- 4) Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

- 7) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- 8) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- 9) Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
- 10) Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;
- 11) Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
- 12) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- 13) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara geografis, Kecamatan Balikpapan Utara memiliki luas wilayah 132,16 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu:

- a) Kelurahan Gunung Samarinda Baru;
- b) Kelurahan Karang Joang;
- c) Kelurahan Graha Indah;
- d) Kelurahan Gunung Samarinda;
- e) Kelurahan Muara Rapak; dan
- f) Kelurahan Batu Ampar.

Adapun struktur kecamatan Balikpapan utara beserta tugas sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA**

Sumber: Perwali No 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan

## **1) CAMAT**

Camat sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

## **2) SEKRETARIS KECAMATAN**

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan, melaksanakan pelayanan administrasi umum dan tata usaha, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan masing-masing seksi.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian:

- a) Penyusunan program;
- b) Pengelolaan urusan keuangan;
- c) Kepegawaian;
- d) Rumah tangga kantor;
- e) Perlengkapan;
- f) Protokol;
- g) Hubungan masyarakat;
- h) Kearsipan;
- i) Surat menyurat; dan
- j) Evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretariat membawahi subbagian dan setiap subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang bertanggungjawab kepada sekretaris.

- a. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- c. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;

- e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- f. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. Pengelolaan anggaran kecamatan dan penerimaan Retribusi;
- h. Pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**a) SUBBAGIAN UMUM**

Subbagian umum mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
- g. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- i. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- k. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **b) SUBBAGIAN KEUANGAN**

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
  - 1. Rencana strategis;
  - 2. Rencana kerja;
  - 3. Rencana kerja tahunan;
  - 4. Penetapan kinerja; dan
  - 5. Laporan kinerja;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- g. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- i. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
- j. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- k. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
- l. Menyusun laporan keuangan kecamatan;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **3) SEKSI PEMERINTAHAN**

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat. Seksi

Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah Kecamatan;
- c. Memfasilitasi permasalahan pertanahan di wilayah Kecamatan;
- d. Melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan;
- e. Memfasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- f. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan;
- g. Menyusun dokumen monografi Kecamatan;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4) SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan kemasyarakatan;
- c. Melaksanakan pengawasan rumah sewa/pondokan;
- d. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. Melaksanakan pengoordinasian pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin;
- f. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan;



- h. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- i. Memfasilitasi permasalahan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketenteraman dan ketertiban wilayah serta antisipasi bencana alam;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **5) SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT**

Seksi Pembangunan Masyarakat dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat. Seksi Pembangunan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pembangunan masyarakat;
- b. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
- c. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan;
- d. Memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian;
- e. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
- f. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
- i. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program pembangunan Kelurahan dan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- j. Menyusun dokumen profil Kecamatan;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

1. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **6) SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Seksi Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial;
- b. Memfasilitasi penanggulangan bencana, pasca bencana dan pengungsi serta masalah sosial;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
- e. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat bergama;
- f. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
- g. Melaksanakan fasilitasi pembinaan program usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **7) SEKSI PELAYANAN PUBLIK**

Seksi Pelayanan Publik, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi Pelayanan Publik;
- b. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan;
- d. Menyusun Standar Operasional Prosedur;
- e. Menyusun Standar Pelayanan;
- f. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
- g. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu;
- h. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;

- i. Mengelola layanan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan
- j. Memfasilitasi dan menindaklanjuti hasil pengaduan warga terhadap pelayanan;
- k. Melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat;
- l. Melaksanakan tatakelola pelayanan publik;
- m. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
- n. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketenteraman, ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
- o. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pada kelurahan;
- p. Melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
- q. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
- r. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **8) LURAH**

Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kelurahan. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Dalam Pasal 17, Lurah mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan Kelurahan
- b. Melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Menyyelenggarakan pelayanan masyarakat;

- d. Menyelenggarakan dan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- e. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Menyelenggarakan administrasi kependudukan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- h. Menyusun dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
- i. Membina lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **9) SEKRETARIS LURAH**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Lurah mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
  - 1. Rencana strategis;
  - 2. Rencana kerja;
  - 3. Rencana kerja tahunan;
  - 4. Penetapan kinerja; dan
  - 5. Laporan kinerja;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- g. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;

- i. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
- j. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- k. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
- l. Menyusun laporan keuangan kelurahan;
- m. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- n. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- o. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- p. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- q. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- r. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- s. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- t. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- u. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- v. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- w. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- x. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- y. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
- z. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- aa. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **10)SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;

- c. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- d. Melaksanakan administrasi pertanahan;
- e. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
- f. Melaksanakan pembinaan rukun tetangga;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
- h. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- i. Menyusun standar operasional dan prosedur pelayanan dan menyusun standar pelayanan lingkup kelurahan;
- j. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
- k. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi pelayanan publik;
- l. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
- m. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan
- n. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
- o. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketenteraman dan Ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
- p. Melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
- q. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
- r. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**11) SEKSI KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- b. Melaksanakan layanan bidang ketenteraman dan ketertiban serta layanan surat pengantar izin pertunjukan dan keramaian;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- d. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan;
- e. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;
- f. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- g. Memfasilitasi permasalahan di bidang ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan koordinasi ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup dengan instansi terkait, lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan rukun tetangga;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **12) SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
- b. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadaya masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
- d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;

- e. Melaksanakan pembinaan penataan pembangunan permukiman penduduk;
- f. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan;
- g. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- h. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat bergama;
- i. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
- j. Melaksanakan fasilitasi pendataan masyarakat rentan masalah sosial dan keluarga miskin;
- k. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial;
- l. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi pembinaan program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
- n. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kegiatan/program kesehatan masyarakat, kesehatan Ibu dan anak serta keluarga berencana;
- o. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha kesejahteraan rakyat;
- p. Melaksanakan fasilitasi penanggulangan korban bencana;
- q. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- r. Melaksanakan penyusunan profil kelurahan;
- s. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **b. Sumber Daya Kecamatan Balikpapan Utara**

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran. Adapun penggunaan atas sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

### **a) Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam



menciptakan Kecamatan Balikpapan Utara sebagai unit pelayanan publik yang baik dan akuntabel.

Berdasarkan analisis beban kerja, cakupan wilayah yang sangat luas dan perlunya koordinasi yang intens Kecamatan Balikpapan Utara, SDM yang ada belum memenuhi dari kebutuhan yang seharusnya. Komposisi Pegawai Kecamatan Balikpapan Utara berdasarkan beberapa kriteria pada tahun 2025 adalah sebagaimana tertera pada Tabel-Tabel berikut.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Pegawai Kecamatan Balikpapan Utara**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
Kecamatan Balikpapan Utara		25	15	40
1	Camat	1		1
2	Sekretaris	1		1
3	Kepala Seksi Pemerintahan	1		1
4	Kepala Seksi Pelayanan Publik		1	1
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	1		1
6	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban & LH	1		1
7	Kepala Seksi Pembangunan	1		1
8	Kasubbag Umum		1	1
9	Kasubbag Program dan Keuangan	1		1
10	Pelaksana	7	3	10
11	PPPK (Pengadministrasi/Operasional)	6	4	10
12	Tenaga Bantu (Naban)	5	6	11
Kelurahan Batu Ampar		5	6	11
1	Lurah	1		1
2	Sekretaris Lurah		1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan & Yanlik			0
4	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban & LH			0
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat		1	1
6	Pelaksana	2	1	3
7	PPPK (Pengadministrasi/Operasional)	1	3	4
8	Tenaga Bantu (Naban)	1		1
Kelurahan Gunung Samarinda		8	5	13
1	Lurah	1		1
2	Sekretaris Lurah		1	1

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
3	Kepala Seksi Pemerintahan & Yanlik		1	1
4	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban & LH	1		1
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat		1	1
6	Pelaksana	3		3
7	PPPK (Pengadministrasi/Operasional)	1	1	2
8	Tenaga Bantu (Naban)	2	1	3
Kelurahan Karang Joang		7	3	10
1	Lurah	1		1
2	Sekretaris Lurah	1		0
3	Kepala Seksi Pemerintahan & Yanlik			0
4	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban & LH	1		1
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1		1
6	Pelaksana	2		3
7	PPPK (Pengadministrasi/Operasional)		2	2
8	Tenaga Bantu (Naban)	1	1	2
Kelurahan Muara Rapak		10	4	14
1	Lurah	1		1
2	Sekretaris Lurah	1		1
3	Kepala Seksi Pemerintahan & Yanlik	1		1
4	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban & LH	1		1
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat		1	1
6	Pelaksana	3	2	5
7	PPPK (Pengadministrasi/Operasional)			
8	Tenaga Bantu (Naban)	3	1	4
Kelurahan Gunung Samarinda Baru		5	6	11
1	Lurah		1	1
2	Sekretaris Lurah	1		1
3	Kepala Seksi Pemerintahan & Yanlik			
4	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban & LH	1		1
5	Kepala Seksi Pemberdayaan	1		1

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
	Masyarakat			
6	Pelaksana		2	2
7	PPPK (Pengadministrasi/Operasional)	1	3	4
8	Tenaga Bantu (Naban)	1		1
<b>Kelurahan Graha Indah</b>		<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>
1	Lurah	1		1
2	Sekretaris Lurah			
3	Kepala Seksi Pemerintahan & Yanlik	1		1
4	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban & LH	1		1
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1		1
6	Pelaksana	1		1
7	PPPK (Pengadministrasi/Operasional)	1	2	3
8	Tenaga Bantu (Naban)	2		2
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>66</b>	<b>43</b>	<b>109</b>

Sumber: Bazeting Kecamatan Balikpapan Utara Bulan April 2025

Adapun data sumber daya manusia aparatur dapat dilihat berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan PNS dan PPPK di Kecamatan Balikpapan Utara sebagaimana tertuang dalam diagram/ tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Golongan Kecamatan Balikpapan Utara**

Tingkat	IV		III		II		I	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Kecamatan Balikpapan Utara	1	1	8	3	3	1	1	-
Kelurahan Muara rapak	-	-	6	2	1	1	-	-
Kelurahan Gunung Samarinda	-	-	5	2	1	-	-	-
Kelurahan Gunung Samarida Baru	-	-	3	3	-	-	-	-

Tingkat	IV		III		II		I	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Kelurahan Batu Ampar	-	-	2	3	1	-	-	-
Kelurahan Graha Indah	-	-	5	-	-	-	-	-
Kelurahan Karang Joang	-	-	6	-	-	-	-	-

**Tabel 2.3**  
**Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan tingkat Pendidikan**  
**Kecamatan Balikpapan Utara**

Tingkat	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
Kecamatan Balikpapan Utara	3	7	-	6	2	-
Kelurahan Muara rapak	-	5	-	4	-	1
Kelurahan Gunung Samarinda	-	4	-	4	-	-
Kelurahan Gunung Samarida Baru	-	3	2	1	-	-
Kelurahan Batu Ampar	-	3	-	3	-	-
Kelurahan Graha Indah	-	3	1	1	-	-
Kelurahan Karang Joang	1	2	1	2	-	-

**Tabel 2.4**  
**Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan Golongan**  
**Kecamatan Balikpapan Utara**

Tingkat	V		VI		VII		IX	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Kecamatan Balikpapan Utara	4	3	-	-	-	1	2	-
Kelurahan Muara rapak	-	-	-	-	-	-	-	-

Tingkat	V		VI		VII		IX	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Kelurahan Gunung Samarinda	-	1	-	-	-	-	1	-
Kelurahan Gunung Samarida Baru	1	2	-	-	-	1	-	-
Kelurahan Batu Ampar	-	3	-	-	1	-	-	-
Kelurahan Graha Indah	1	2	-	-	-	-	-	-
Kelurahan Karang Joang	-	2	-	-	-	-	-	-

**Tabel 2.5**  
**Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan tingkat Pendidikan Kecamatan Balikpapan Utara**

Tingkat	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
Kecamatan Balikpapan Utara	-	2	1	7	-	-
Kelurahan Muara rapak	-	-	-	-	-	-
Kelurahan Gunung Samarinda	-	1	-	1	-	-
Kelurahan Gunung Samarida Baru	-	-	1	3	-	-
Kelurahan Batu Ampar	-	1	-	3	-	-
Kelurahan Graha Indah	-	-	-	3	-	-
Kelurahan Karang Joang	-	-	-	2	-	-

Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Kecamatan Balikpapan Utara terdiri dari 59 Orang PNS, 25 Orang PPPK dan 25 Orang Non PNS. Untuk tingkat pendidikan didominasi oleh kualifikasi pendidikan D4/S1 untuk PNS dan kualifikasi pendidikan SMA untuk PPPK.

Dengan jumlah pegawai tersebut, Kecamatan Balikpapan Utara masih mengalami kekurangan SDM. Untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Kecamatan Balikpapan Utara melakukan optimalisasi personil dengan menambah beban tugas terhadap personil yang ada dan mengusulkan tambahan pegawai ke BKPSDM Kota Balikpapan.

**b) Sarana dan Prasarana**

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Balikpapan Utara dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Berikut dirincikan sarana prasarana yang dimiliki Kecamatan Balikpapan Utara beserta enam kelurahan yang disajikan dengan nilai barangnya.

**Tabel 2.6**

**Sarana dan Prasarana Kerja Kecamatan Balikpapan Utara**

Kode	Nama Barang	Jumlah (Rp)
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>42.011.771.868</b>
	Tanah	3.473.339.500
	Peralatan dan Mesin	8.061.168.536
	Gedung dan Bangunan	43.964.008.922
	Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.920.011.045
	Aset Tetap Lainnya	3.395.000
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>629.472.878</b>
	Aset Lain-Lain	629.472.878

**c. Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara**

Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan tertuang dalam Renstra, Berdasarkan Renstra Kecamatan Balikpapan Utara periode 2021-2026 terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang diukur melalui 2 (dua) indikator sasaran.

Berdasarkan pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagaimana Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat diukur dari

ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan tertuang dalam Renstra. Berikut Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut.



**Tabel 2.7**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5		4	5		6	7		8	9
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	81,20	83,05	103,35%	81,25	81,00	99,69%	81,30	80,00	98,40%	81,35	88,80	109,16%
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	-	73,99	-	74,25	74,20	99,00%	74,50	70,84	95,09%	74,75	70,38	94,15%



d. Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok Sasaran adalah pihak-pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan yang menjadi kewenangan kecamatan. Adapun Kelompok Sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah:

- 1) Internal, untuk seluruh pegawai di kelurahan dan kecamatan se-Kecamatan Balikpapan Utara; dan
- 2) Eksternal, untuk seluruh masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara dan Instansi Vertikal yang bersinggungan dengan Kecamatan Balikpapan Utara.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang muncul di Kecamatan Balikpapan Utara dalam pelaksanaan tupoksi kecamatan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum di Tingkat kecamatan sebagai berikut:

**Tabel 2.8**  
**Permasalahan di Kecamatan Balikpapan Utara**

No	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah
1	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat serta Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan Balikpapan Utara	Belum optimalnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Minimnya Sarpas Pelayanan Minimnya Kuantitas dan Kualitas SDM Belum terbangunnya integrasi pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan
		Masih rendahnya keterlibatan komponen masyarakat dalam pembangunan	Minimnya Akses, kurangnya sosialisasi tentang pentingnya partisipasi Masyarakat dalam pembangunan
		Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif	Minimnya Akses, kurangnya sosialisasi tentang pentingnya partisipasi Masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif

No	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah
		Masih tingginya kasus Pencemaran Lingkungan	Pengelolaan sampah yang kurang maksimal Pelanggaran Site Plant Pelanggaran Tata Ruang Warga Membuang Sampah Limbah Industri
		Kurang ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum	Keterbatasan Lahan Keterbatasan Anggaran Perencanaan kegiatan yag kurang baik
		Meningkatnya Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat	Meningkatnya jumlah pendudukan Berkembangnya aspek ekonomi dan sosial masyarakat
		Meningkatnya Jumlah Penduduk dan Mobilitas Masyarakat	Meningkatnya jumlah pendudukan Berkembangnya aspek ekonomi dan sosial masyarakat
		Belum optimalnya penanganan bencana	Belum terbangunnya integrasi di Kelurahan dan Kecamatan dengan OPD Teknis
		Relokasi Gedung kantor kelurahan karena sudah tidak representatif	Minimnya Sarpas Pelayanan meningkatnya permohonan pelayanan dari masyarakat

**b. Isu Strategis**

Dari permasalahan di atas baik yang bersifat multisektor maupun sektoral menjadi bahan lebih lanjut dalam perumusan isu strategis melalui pertimbangan urgensi (*urgency*), kepentingan (*seriousness*), dan pertumbuhan (*growth*). Isu strategis dalam isu penyelenggaraan pemerintahan berbasis kewilayahan di Kecamatan adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.9**  
**Simpulan Isu Strategis Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan**

NO	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
	(Kewenangan PD)	(Sumber dari data capaian kinerja periode sebelumnya) Gap capaian dan ekspektasi	(KLHS RPJMD/Ranwal)	Global	Nasional	Regional	
				Indikator Global	Indikator Nasional	Indikator Lokal	Kesimpulan
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	<p>Belum optimalnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>Masih rendahnya keterlibatan komponen masyarakat dalam pembangunan</p> <p>Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif</p> <p>Masih tingginya kasus Pencemaran Lingkungan</p>	Masih adanya pelanggaran terhadap peraturan pemerintah	Perubahan Iklim, Urbanisasi/Mobilitas Masyarakat Internalisasional	Pembangunan IKN	Isu Strategis dalam RPJMD Kota Balikpapan: Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Tingkat Kecamatan

NO	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
	(Kewenangan PD)	(Sumber dari data capaian kinerja periode sebelumnya) Gap capaian dan ekspektasi	(KLHS RPJMD/Ranwal)	Global	Nasional	Regional	
				Indikator Global	Indikator Nasional	Indikator Lokal	Kesimpulan
		Kurang ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum  Meningkatnya Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat  Meningkatnya Jumlah Penduduk dan Mobilitas Masyarakat  Belum optimalnya penanganan bencana  Relokasi Gedung kantor kelurahan karena sudah tidak representatif					

### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025-2029 didasarkan pada analisis terhadap isu strategis serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

##### **3.1 TUJUAN**

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan selama periode Rencana Sterategis (Renstr

a) Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan”.

### **3.2 SASARAN**

Sasaran merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam melayani masyarakat yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan;
- 2) Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Balikpapan Utara beserta indikator kinerjanya dapat disajikan dalam Tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Kecamatan Balikpapan Utara**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(Data/Informasi Kementrian)	(Sasaran RPJMD)	(Rangkaian kinerja yang berupa tahapan dan fokus prioritas)								
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	88,85	89,03	89,31	89,54	89,77	90,00	
		Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	66,67	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	72,04	72,50	72,75	73,00	73,50	74,00	

3.3 STRATEGI

Strategi Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2025-2029 adalah rencana Tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah/ Upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Penahapan Pembangunan adalah prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Berikut tahapan Pembangunan Kecamatan Balikpapan Utara selama periode 2025-2029:

Tabel 3.2  
Penahapan Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penataan dan Pembinaan Wilayah Pemekaran di Kecamatan Balikpapan Utara	Revitalisasi Kawasan Ekonomi di Seputaran Kampung Timur (PKL dan UMKM)	Penataan Kawasan Pendidikan Sekolah SD-SMP Terpadu di Kelurahan Gunung Samarinda Baru	Penataan Kawasan Pertanian dan Pernakan (Ketahanan Pangan) di Kelurahan Karang Joang	Penataan Kawasan Hijau Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kel. Gunung Samarinda Baru
	Penataan Kawasan Wisata di Kelurahan Karang Joang	Penataan Kawasan Pendidikan Sekolah SMP di Kelurahan Batu Ampar		Penataan Kawasan Hijau Ruang Terbuka Publik (RTP) di Kel. Graha Indah

3.4 ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Arah kebijakan yang dirumuskan dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang lebih operasional. Adapun arah kebijakan Kecamatan Balikpapan Utara selama periode 2025-2029 sebagai berikut:



**Tabel 3.3**  
**Arah Kebijakan Kecamatan Balikpapan Utara**

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan PD	Keterangan
1	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Pengembangan SPBE untuk meningkatkan kualitas pelayanan	Penguatan Pelayanan Publik	
			Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	
			Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	
			Penguatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan	
			Pengembangan Sumber Daya Manusia Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan**

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025-2029 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan selama periode renstra di atas. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

- 1) Mempedomani RKJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029;
- 2) Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2025-2030, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Balikpapan.
- 3) Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Balikpapan;
- 4) Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Balikpapan Utara;
- 5) Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan.
- 6) Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan.

Rumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025-2029 sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dan di sempurnakan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 yaitu:

#### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  7. Fasilitas Kunjungan Tamu
  8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  10. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

4. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  1. Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
  1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

## **III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

10. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
  1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
  2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  4. Evaluasi Kelurahan
11. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
  1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
  2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
  3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
  4. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
  5. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

## **IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
13. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
  1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

14. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
  1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

### **4.2 Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Subkegiatan**

Pagu Indikatif merupakan batas maksimal anggaran yang dialokasikan untuk setiap program, kegiatan, hingga sub-kegiatan. Pagu Indikatif ini berfungsi sebagai batas estimasi anggaran yang akan menjadi acuan penting bagi kita semua dalam merancang program, kegiatan, dan sub-kegiatan, agar dapat berjalan optimal dan mencapai sasaran yang diharapkan.

Adapun Rumusan rencana program, kegiatan dan subkegiatan beserta Pendanaan Kecamatan Balikpapan Utara selama periode Tahun 2025-2029 sebagai berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025-2030**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				42.134.028.000		45.665.816.000		47.949.107.000		48.908.089.000		50.375.332.000		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				20.685.528.000		26.648.016.000		27.793.149.500		28.116.003.000		28.499.521.400		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	82,88	83,5	20.685.528.000	83,75	26.648.016.000	84	27.793.149.500	84,25	28.116.003.000	84,5	28.499.521.400	7.01.0.00.0.00.04 .0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.150.000		54.050.000		62.157.500		71.480.500		82.203.000		
Terwujudnya Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	3	50.150.000	4	54.050.000	4	62.157.500	4	71.480.500	5	82.203.000		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	3		3		3		3		3			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				23.400.000		25.300.000		29.095.000		33.459.500		38.478.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	3	23.400.000	4	25.300.000	4	29.095.000	4	33.459.500	5	38.478.000		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				26.750.000		28.750.000		33.062.500		38.021.000		43.725.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	3	26.750.000	3	28.750.000	3	33.062.500	3	38.021.000	3	43.725.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.540.844.000		17.450.000.000		17.459.787.100		17.470.000.000		17.490.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Efisien, Transparan, dan Akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60	91	12.540.844.000	91	17.450.000.000	91	17.459.787.100	91	17.470.000.000	91	17.490.000.000				
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.540.844.000		17.450.000.000		17.459.787.100		17.470.000.000		17.490.000.000				
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60	91	12.540.844.000	91	17.450.000.000	91	17.459.787.100	91	17.470.000.000	91	17.490.000.000				
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				831.059.475		942.149.000		1.040.346.000		1.055.335.500		1.095.000.000				
Terwujudnya Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	831.059.475	1	942.149.000	1	1.040.346.000	1	1.055.335.500	1	1.095.000.000				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	65				70				75					80
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				81.059.475		79.649.000		91.596.000		105.335.500		115.000.000				
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	81.059.475	1	79.649.000	1	91.596.000	1	105.335.500	1	115.000.000				
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				750.000.000		862.500.000		948.750.000		950.000.000		980.000.000				
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	65	750.000.000	70	862.500.000	75	948.750.000	80	950.000.000	85	980.000.000				
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.545.340.000		2.766.541.000		3.295.574.650		3.354.550.000		3.455.683.100				
Terwujudnya Layanan Umum Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	31	35	2.545.340.000	38	2.766.541.000	40	3.295.574.650	43	3.354.550.000	45	3.455.683.100				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	2				1				1					1
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1	1				1				1					1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)													
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	9	8		8		8		8		8			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0		1		1		1		0			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0		10		20		30		40			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						50.000.000				55.000.000			
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	1	70.683.100		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				500.000.000		534.750.000		700.000.000		705.000.000		710.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	5	500.000.000	5	534.750.000	5	700.000.000	5	705.000.000	5	710.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	yang Disediakan (Paket)													
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				140.000.000		100.000.000		125.000.000		130.000.000		135.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	2	140.000.000	1	100.000.000	1	125.000.000	1	130.000.000	1	135.000.000		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				760.000.000		836.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.050.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	9	8	760.000.000	8	836.000.000	8	1.000.000.000	8	1.000.000.000	8	1.050.000.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.000.000		103.500.000		119.025.000		125.000.000		130.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	3	100.000.000	3	103.500.000	3	119.025.000	3	125.000.000	3	130.000.000		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				148.340.000		170.591.000		196.179.650		198.000.000		200.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	148.340.000	12	170.591.000	12	196.179.650	12	198.000.000	12	200.000.000		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000		55.000.000		60.500.000		65.000.000		70.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.500.000	12	65.000.000	12	70.000.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				797.000.000		876.700.000		964.370.000		970.000.000		990.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	31	35	797.000.000	38	876.700.000	40	964.370.000	43	970.000.000	45	990.000.000		
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		25.000.000		50.000.000		75.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	0	0	0	10	25.000.000	20	50.000.000	30	75.000.000	40	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dinamis pada SKPD (Dokumen)													
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0		10.000.000		20.000.000		20.000.000		0		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0	0	1	10.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	0	0		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				221.939.000		284.195.000		313.301.750		352.797.000		398.216.800		
Terpenuhinya Kebutuhan Barang dan Peralatan yang Diperlukan Untuk Menunjang Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	221.939.000	2	284.195.000	2	313.301.750	2	352.797.000	2	398.216.800		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7	3		3		3		3		3			
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				99.300.000		114.195.000		131.324.250		151.023.000		173.676.300		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	99.300.000	1	114.195.000	1	131.324.250	1	151.023.000	1	173.676.300		
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				122.639.000		130.000.000		131.977.500		151.774.000		174.540.500		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7	3	122.639.000	3	130.000.000	3	131.977.500	3	151.774.000	3	174.540.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		40.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	2	40.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.161.195.525		3.431.531.000		3.647.000.000		3.737.128.500		3.775.000.000		
Terwujudnya Operasional Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	3.161.195.525	36	3.431.531.000	36	3.647.000.000	36	3.737.128.500	36	3.775.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		36		36		36		36			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				700.000.000		770.000.000		847.000.000		900.000.000		925.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	700.000.000	36	770.000.000	36	847.000.000	36	900.000.000	36	925.000.000		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.461.195.525		2.661.531.000		2.800.000.000		2.837.128.500		2.850.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.461.195.525	36	2.661.531.000	36	2.800.000.000	36	2.837.128.500	36	2.850.000.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.335.000.000		1.719.550.000		1.974.982.500		2.074.711.500		2.203.418.500		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Agar Berfungsi Optimal	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	39	44	1.335.000.000	47	1.719.550.000	50	1.974.982.500	53	2.074.711.500	56	2.203.418.500		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	5	3		6		7		7		7			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dipelihara/Direhabilit asi (Unit)													
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi (Unit)	0	0		1		1		0		0			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	142	192		192		192		192		192			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				85.000.000		94.300.000		108.445.000		124.711.500		143.418.500		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	1	85.000.000	1	94.300.000	1	108.445.000	1	124.711.500	1	143.418.500		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				700.000.000		787.750.000		905.912.500		950.000.000		960.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	39	44	700.000.000	47	787.750.000	50	905.912.500	53	950.000.000	56	960.000.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				250.000.000		307.500.000		330.625.000		350.000.000		400.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	142	192	250.000.000	192	307.500.000	192	330.625.000	192	350.000.000	192	400.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				300.000.000		500.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi (Unit)	5	3	300.000.000	6	500.000.000	7	600.000.000	7	650.000.000	7	700.000.000		
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		30.000.000		30.000.000		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi (Unit)	0	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	0	0	0	0		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.356.779.785		1.498.707.000		1.607.343.000		1.669.232.500		1.760.572.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	1.356.779.785	100	1.498.707.000	100	1.607.343.000	100	1.669.232.500	100	1.760.572.000	7.01.0.00.0.00.04 .0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan				800.348.555		880.383.000		920.000.000		925.000.000		930.000.000		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	5	6	800.348.555	6	880.383.000	6	920.000.000	6	925.000.000	6	930.000.000		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				800.348.555		880.383.000		920.000.000		925.000.000		930.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	5	6	800.348.555	6	880.383.000	6	920.000.000	6	925.000.000	6	930.000.000		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				125.000.000		143.750.000		165.312.500		170.000.000		185.000.000		
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang Dilayani Sesuai Standar Pelayanan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	531	600	125.000.000	600	143.750.000	600	165.312.500	600	170.000.000	600	185.000.000		
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				125.000.000		143.750.000		165.312.500		170.000.000		185.000.000		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	531	600	125.000.000	600	143.750.000	600	165.312.500	600	170.000.000	600	185.000.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	100	100	1.356.779.785	100	1.498.707.000	100	1.607.343.000	100	1.669.232.500	100	1.760.572.000	7.01.0.00.0.00.04 .0001 - KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				69.660.000		76.626.000		84.288.500		92.717.000		101.988.500		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	2	69.660.000	2	76.626.000	2	84.288.500	2	92.717.000	2	101.988.500		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan				69.660.000		76.626.000		84.288.500		92.717.000		101.988.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	2	69.660.000	2	76.626.000	2	84.288.500	2	92.717.000	2	101.988.500		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	100	100	1.356.779.785	100	1.498.707.000	100	1.607.343.000	100	1.669.232.500	100	1.760.572.000	7.01.0.00.0.00.04 .0002 - KELURAHAN KARANG JOANG	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				72.440.000		79.684.000		87.652.000		96.417.000		110.879.500		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	2	72.440.000	2	79.684.000	2	87.652.000	2	96.417.000	2	110.879.500		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				72.440.000		79.684.000		87.652.000		96.417.000		110.879.500		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	2	72.440.000	2	79.684.000	2	87.652.000	2	96.417.000	2	110.879.500		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan	100	100	1.356.779.785	100	1.498.707.000	100	1.607.343.000	100	1.669.232.500	100	1.760.572.000	7.01.0.00.0.00.04 .0003 - KELURAHAN GRAHA INDAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)													
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				80.000.000		88.000.000		96.800.000		106.480.000		117.128.000		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	2	80.000.000	2	88.000.000	2	96.800.000	2	106.480.000	2	117.128.000		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				80.000.000		88.000.000		96.800.000		106.480.000		117.128.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	2	80.000.000	2	88.000.000	2	96.800.000	2	106.480.000	2	117.128.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	100	100	1.356.779.785	100	1.498.707.000	100	1.607.343.000	100	1.669.232.500	100	1.760.572.000	7.01.0.00.0.00.04 .0004 - KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				72.650.080		79.915.000		87.906.500		96.697.000		106.366.500		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	0	2	72.650.080	2	79.915.000	2	87.906.500	2	96.697.000	2	106.366.500		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Instansi Vertikal Terkait (Laporan)													
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				72.650.080		79.915.000		87.906.500		96.697.000		106.366.500		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	2	72.650.080	2	79.915.000	2	87.906.500	2	96.697.000	2	106.366.500		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	100	100	1.356.779.785	100	1.498.707.000	100	1.607.343.000	100	1.669.232.500	100	1.760.572.000	7.01.0.00.0.00.04 .0005 - KELURAHAN MUARA RAPAK	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan  Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				81.681.150		89.849.000		98.833.500		108.716.500		125.024.000		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	2	81.681.150	2	89.849.000	2	98.833.500	2	108.716.500	2	125.024.000		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				81.681.150		89.849.000		98.833.500		108.716.500		125.024.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	0	2	81.681.150	2	89.849.000	2	98.833.500	2	108.716.500	2	125.024.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)													
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	100	100	1.356.779.785	100	1.498.707.000	100	1.607.343.000	100	1.669.232.500	100	1.760.572.000	7.01.0.00.0.00.04 .0006 - KELURAHAN BATU AMPAR	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000		84.185.500		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	2	55.000.000	2	60.500.000	2	66.550.000	2	73.205.000	2	84.185.500		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000		84.185.500		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	2	55.000.000	2	60.500.000	2	66.550.000	2	73.205.000	2	84.185.500		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				18.440.720.215		15.667.193.700		16.417.351.500		16.823.400.500		17.555.750.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan	17,11	19	18.440.720.215	20	15.667.193.700	21	16.417.351.500	22	16.823.400.500	23	17.555.750.000	7.01.0.00.0.00.04 .0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	masyarakat di wilayah kecamatan (%)													
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				239.000.000		267.900.000		285.200.000		295.000.000		325.000.000		
Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	85	85	239.000.000	85	267.900.000	85	285.200.000	85	295.000.000	85	325.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	6	3		3		3		3		3			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				100.000.000		115.000.000		126.500.000		135.000.000		150.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	85	85	100.000.000	85	115.000.000	85	126.500.000	85	135.000.000	85	150.000.000		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				139.000.000		152.900.000		158.700.000		160.000.000		175.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	6	3	139.000.000	3	152.900.000	3	158.700.000	3	160.000.000	3	175.000.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.487.651.445		1.425.968.700		1.658.630.000		1.705.000.000		1.835.000.000		
Tercapai Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	3	3	1.487.651.445	3	1.425.968.700	3	1.658.630.000	3	1.705.000.000	3	1.835.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	0	394		394		394		394		394			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	3	2		2		2		2		2			
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				634.651.445		825.168.700		930.000.000		935.000.000		950.000.000		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	3	3	634.651.445	3	825.168.700	3	930.000.000	3	935.000.000	3	950.000.000		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				90.000.000		95.000.000		109.250.000		115.000.000		125.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	0	394	90.000.000	394	95.000.000	394	109.250.000	394	115.000.000	394	125.000.000		
7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan				0		20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	2	20.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				685.000.000		400.000.000		500.000.000		530.000.000		625.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha	3	2	685.000.000	2	400.000.000	2	500.000.000	2	530.000.000	2	625.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Ekonomi Masyarakat (Laporan)													
7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				78.000.000		85.800.000		94.380.000		95.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	1	78.000.000	1	85.800.000	1	94.380.000	1	95.000.000	1	100.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	17,11	19	18.440.720.215	20	15.667.193.700	21	16.417.351.500	22	16.823.400.500	23	17.555.750.000	7.01.0.00.0.00.04 .0001 - KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU	
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100				100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				892.000.000		803.300.000		635.545.000		669.633.000		746.492.500		
Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	92	47	892.000.000	7	803.300.000	7	635.545.000	7	669.633.000	7	746.492.500		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	40	38		38		38		38		38			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum				30.000.000		34.500.000		39.675.000		45.626.000		52.470.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	40	38	30.000.000	38	34.500.000	38	39.675.000	38	45.626.000	38	52.470.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				800.000.000		700.000.000		500.000.000		540.000.000		600.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	92	47	800.000.000	7	700.000.000	7	500.000.000	7	540.000.000	7	600.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				50.000.000		55.000.000		80.000.000		66.550.000		76.532.500		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	1	50.000.000	1	55.000.000	1	80.000.000	1	66.550.000	1	76.532.500		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				12.000.000		13.800.000		15.870.000		17.457.000		17.490.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1	12.000.000	1	13.800.000	1	15.870.000	1	17.457.000	1	17.490.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				831.340.000		914.474.000		1.105.921.000		1.106.000.000		1.110.000.000		
Tercapai Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	38	36	831.340.000	36	914.474.000	36	1.105.921.000	36	1.106.000.000	36	1.110.000.000		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				831.340.000		914.474.000		1.105.921.000		1.106.000.000		1.110.000.000		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	38	36	831.340.000	36	914.474.000	36	1.105.921.000	36	1.106.000.000	36	1.110.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	17,11	19	18.440.720.215	20	15.667.193.700	21	16.417.351.500	22	16.823.400.500	23	17.555.750.000	7.01.0.00.0.00.04 .0002 - KELURAHAN KARANG JOANG	
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.554.500.000		809.050.000		640.145.000		670.461.000		747.595.000		
Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	186	129	2.554.500.000	7	809.050.000	7	640.145.000	7	670.461.000	7	747.595.000		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	68	66		66		66		66		66			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				35.000.000		40.250.000		44.275.000		48.702.500		53.572.500		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	68	66	35.000.000	66	40.250.000	66	44.275.000	66	48.702.500	66	53.572.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				2.457.500.000		700.000.000		500.000.000		540.000.000		600.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	186	129	2.457.500.000	7	700.000.000	7	500.000.000	7	540.000.000	7	600.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				50.000.000		55.000.000		80.000.000		66.550.000		76.532.500		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	1	50.000.000	1	55.000.000	1	80.000.000	1	66.550.000	1	76.532.500		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				12.000.000		13.800.000		15.870.000		15.208.500		17.490.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1	12.000.000	1	13.800.000	1	15.870.000	1	15.208.500	1	17.490.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.347.560.000		1.482.316.000		1.730.547.500		1.767.000.000		1.780.000.000		
Tercapai Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	66	64	1.347.560.000	64	1.482.316.000	64	1.730.547.500	64	1.767.000.000	64	1.780.000.000		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.347.560.000		1.482.316.000		1.730.547.500		1.767.000.000		1.780.000.000		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	66	64	1.347.560.000	64	1.482.316.000	64	1.730.547.500	64	1.767.000.000	64	1.780.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100	18.440.720.215	100	15.667.193.700	100	16.417.351.500	100	16.823.400.500	100	17.555.750.000	7.01.0.00.0.00.04 .0003 - KELURAHAN GRAHA INDAH	
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	17,11	19				20				21			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.264.500.000		814.800.000		646.470.000		679.948.500		758.022.500		
Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	147	67	1.264.500.000	7	814.800.000	7	646.470.000	7	679.948.500	7	758.022.500		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	76	74		74		74		74		74			
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				40.000.000		46.000.000		50.600.000		58.190.000		64.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	76	74	40.000.000	74	46.000.000	74	50.600.000	74	58.190.000	74	64.000.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.162.500.000		700.000.000		500.000.000		540.000.000		600.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	147	67	1.162.500.000	7	700.000.000	7	500.000.000	7	540.000.000	7	600.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				50.000.000		55.000.000		80.000.000		66.550.000		76.532.500		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	2	1	50.000.000	1	55.000.000	1	80.000.000	1	66.550.000	1	76.532.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kelurahan (Pokmas / Ormas)													
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				12.000.000		13.800.000		15.870.000		15.208.500		17.490.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1	12.000.000	1	13.800.000	1	15.870.000	1	15.208.500	1	17.490.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.490.000.000		1.639.000.000		1.902.900.000		1.950.000.000		1.965.000.000		
Tercapai Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	74	72	1.490.000.000	72	1.639.000.000	72	1.902.900.000	72	1.950.000.000	72	1.965.000.000		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.490.000.000		1.639.000.000		1.902.900.000		1.950.000.000		1.965.000.000		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	74	72	1.490.000.000	72	1.639.000.000	72	1.902.900.000	72	1.950.000.000	72	1.965.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	17,11	19	18.440.720.215	20	15.667.193.700	21	16.417.351.500	22	16.823.400.500	23	17.555.750.000	7.01.0.00.0.00.04 .0004 - KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA	
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100				100				100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.307.000.000		809.050.000		640.145.000		670.461.000		747.595.000		
Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	63	61	1.307.000.000	61	809.050.000	61	640.145.000	61	670.461.000	61	747.595.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	127	64		8		8		8		8			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				35.000.000		40.250.000		44.275.000		48.702.500		53.572.500		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	63	61	35.000.000	61	40.250.000	61	44.275.000	61	48.702.500	61	53.572.500		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.210.000.000		700.000.000		500.000.000		540.000.000		600.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	127	64	1.210.000.000	8	700.000.000	8	500.000.000	8	540.000.000	8	600.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				50.000.000		55.000.000		80.000.000		66.550.000		76.532.500		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	1	50.000.000	1	55.000.000	1	80.000.000	1	66.550.000	1	76.532.500		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				12.000.000		13.800.000		15.870.000		15.208.500		17.490.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1	12.000.000	1	13.800.000	1	15.870.000	1	15.208.500	1	17.490.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.257.349.920		1.383.084.500		1.621.392.500		1.650.000.000		1.675.000.000		
Tercapai Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	61	59	1.257.349.920	59	1.383.084.500	59	1.621.392.500	59	1.650.000.000	59	1.675.000.000		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.257.349.920		1.383.084.500		1.621.392.500		1.650.000.000		1.675.000.000		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	61	59	1.257.349.920	59	1.383.084.500	59	1.621.392.500	59	1.650.000.000	59	1.675.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	17,11	19	18.440.720.215	20	15.667.193.700	21	16.417.351.500	22	16.823.400.500	23	17.555.750.000	7.01.0.00.0.00.04 .0005 - KELURAHAN MUARA RAPAK	
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100				100				100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.002.000.000		814.800.000		646.470.000		679.948.500		758.022.500		
Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1	1.002.000.000	1	814.800.000	1	646.470.000	1	679.948.500	1	758.022.500		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	126	56		8		8		8		8			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	90	88		88		88		88		88			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)													
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				40.000.000		46.000.000		50.600.000		58.190.000		64.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	90	88	40.000.000	88	46.000.000	88	50.600.000	88	58.190.000	88	64.000.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				900.000.000		700.000.000		500.000.000		540.000.000		600.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	126	56	900.000.000	8	700.000.000	8	500.000.000	8	540.000.000	8	600.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				50.000.000		55.000.000		80.000.000		66.550.000		76.532.500		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	1	50.000.000	1	55.000.000	1	80.000.000	1	66.550.000	1	76.532.500		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				12.000.000		13.800.000		15.870.000		15.208.500		17.490.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1	12.000.000	1	13.800.000	1	15.870.000	1	15.208.500	1	17.490.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.748.318.850		1.923.150.500		2.215.465.500		2.250.000.000		2.275.000.000		
Tercapai Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	88	86	1.748.318.850	86	1.923.150.500	86	2.215.465.500	86	2.250.000.000	86	2.275.000.000		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.748.318.850		1.923.150.500		2.215.465.500		2.250.000.000		2.275.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	88	86	1.748.318.850	86	1.923.150.500	86	2.215.465.500	86	2.250.000.000	86	2.275.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	17,11	19	18.440.720.215	20	15.667.193.700	21	16.417.351.500	22	16.823.400.500	23	17.555.750.000	7.01.0.00.0.00.04 .0006 - KELURAHAN BATU AMPAR	
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100				100		100					
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.414.500.000		814.800.000		646.470.000		679.948.500		758.022.500		
Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	183	88	1.414.500.000	7	814.800.000	7	646.470.000	7	679.948.500	7	758.022.500		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	1				1		1					
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	81	79				79		79		79			
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1				1		1		1			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				40.000.000		46.000.000		50.600.000		58.190.000		64.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	81	79	40.000.000	79	46.000.000	79	50.600.000	79	58.190.000	79	64.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)													
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.312.500.000		700.000.000		500.000.000		540.000.000		600.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	183	88	1.312.500.000	7	700.000.000	7	500.000.000	7	540.000.000	7	600.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				50.000.000		55.000.000		80.000.000		66.550.000		76.532.500		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	1	50.000.000	1	55.000.000	1	80.000.000	1	66.550.000	1	76.532.500		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				12.000.000		13.800.000		15.870.000		15.208.500		17.490.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1	12.000.000	1	13.800.000	1	15.870.000	1	15.208.500	1	17.490.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.605.000.000		1.765.500.000		2.042.050.000		2.050.000.000		2.075.000.000		
Tercapai Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	79	77	1.605.000.000	77	1.765.500.000	77	2.042.050.000	77	2.050.000.000	77	2.075.000.000		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.605.000.000		1.765.500.000		2.042.050.000		2.050.000.000		2.075.000.000		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	79	77	1.605.000.000	77	1.765.500.000	77	2.042.050.000	77	2.050.000.000	77	2.075.000.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				1.361.000.000		1.518.399.300		1.752.338.000		1.875.070.000		2.077.198.600		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	1.361.000.000	100	1.518.399.300	100	1.752.338.000	100	1.875.070.000	100	2.077.198.600	7.01.0.00.0.00.04 .0000 - KECAMATAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													BALIKPAPAN UTARA	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				245.580.000		286.000.000		350.000.000		360.000.000		400.000.000		
Terselenggaranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	35	16	245.580.000	14	286.000.000	14	350.000.000	14	360.000.000	14	400.000.000		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				245.580.000		286.000.000		350.000.000		360.000.000		400.000.000		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	35	16	245.580.000	14	286.000.000	14	350.000.000	14	360.000.000	14	400.000.000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				239.420.000		253.000.000		325.000.000		330.000.000		350.000.000		
Terwujudnya Kecamatan Taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	15	239.420.000	15	253.000.000	15	325.000.000	15	330.000.000	15	350.000.000		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				239.420.000		253.000.000		325.000.000		330.000.000		350.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	15	239.420.000	15	253.000.000	15	325.000.000	15	330.000.000	15	350.000.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	1.361.000.000	100	1.518.399.300	100	1.752.338.000	100	1.875.070.000	100	2.077.198.600	7.01.0.00.0.00.04 .0001 - KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				76.000.000		83.600.000		91.960.000		101.156.000		116.329.000		
Terselenggaranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	16	76.000.000	15	83.600.000	15	91.960.000	15	101.156.000	15	116.329.000		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				76.000.000		83.600.000		91.960.000		101.156.000		116.329.000		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	16	76.000.000	15	83.600.000	15	91.960.000	15	101.156.000	15	116.329.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				70.000.000		77.000.000		84.700.000		93.170.000		107.145.500		
Terwujudnya Kecamatan Taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	70.000.000	14	77.000.000	14	84.700.000	14	93.170.000	14	107.145.500		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				70.000.000		77.000.000		84.700.000		93.170.000		107.145.500		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	70.000.000	14	77.000.000	14	84.700.000	14	93.170.000	14	107.145.500		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	1.361.000.000	100	1.518.399.300	100	1.752.338.000	100	1.875.070.000	100	2.077.198.600	7.01.0.00.0.00.04 .0002 - KELURAHAN KARANG JOANG	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				67.600.000		74.360.000		81.796.000		89.975.500		103.471.500		
Terselenggaranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	16	67.600.000	15	74.360.000	15	81.796.000	15	89.975.500	15	103.471.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				67.600.000		74.360.000		81.796.000		89.975.500		103.471.500		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	16	67.600.000	15	74.360.000	15	81.796.000	15	89.975.500	15	103.471.500		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				78.400.000		86.240.000		94.864.000		104.350.000		114.785.000		
Terwujudnya Kecamatan Taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	78.400.000	14	86.240.000	14	94.864.000	14	104.350.000	14	114.785.000		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				78.400.000		86.240.000		94.864.000		104.350.000		114.785.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	78.400.000	14	86.240.000	14	94.864.000	14	104.350.000	14	114.785.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan	100	100	1.361.000.000	100	1.518.399.300	100	1.752.338.000	100	1.875.070.000	100	2.077.198.600	7.01.0.00.0.00.04 .0003 -	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ketertiban Umum di Kecamatan	Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)												KELURAHAN GRAHA INDAH	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				72.000.000		79.200.000		87.120.000		95.832.000		105.415.000		
Terselenggaranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	16	72.000.000	15	79.200.000	15	87.120.000	15	95.832.000	15	105.415.000		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				72.000.000		79.200.000		87.120.000		95.832.000		105.415.000		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	16	72.000.000	15	79.200.000	15	87.120.000	15	95.832.000	15	105.415.000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				74.000.000		81.400.000		89.540.000		98.494.000		113.268.000		
Terwujudnya Kecamatan Taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	74.000.000	14	81.400.000	14	89.540.000	14	98.494.000	14	113.268.000		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				74.000.000		81.400.000		89.540.000		98.494.000		113.268.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	74.000.000	14	81.400.000	14	89.540.000	14	98.494.000	14	113.268.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	1.361.000.000	100	1.518.399.300	100	1.752.338.000	100	1.875.070.000	100	2.077.198.600	7.01.0.00.0.00.04 .0004 - KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				42.000.000		62.000.000		68.200.000		75.020.000		82.522.000		
Terselenggaranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	16	42.000.000	15	62.000.000	15	68.200.000	15	75.020.000	15	82.522.000		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				42.000.000		62.000.000		68.200.000		75.020.000		82.522.000		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	16	42.000.000	15	62.000.000	15	68.200.000	15	75.020.000	15	82.522.000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan				104.000.000		114.400.000		125.840.000		138.424.000		152.266.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
Terwujudnya Kecamatan Taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	104.000.000	14	114.400.000	14	125.840.000	14	138.424.000	14	152.266.000		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				104.000.000		114.400.000		125.840.000		138.424.000		152.266.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	104.000.000	14	114.400.000	14	125.840.000	14	138.424.000	14	152.266.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	1.361.000.000	100	1.518.399.300	100	1.752.338.000	100	1.875.070.000	100	2.077.198.600	7.01.0.00.0.00.04 .0005 - KELURAHAN MUARA RAPAK	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				73.442.125		80.786.300		88.864.500		97.750.500		107.525.500		
Terselenggaranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	16	73.442.125	15	80.786.300	15	88.864.500	15	97.750.500	15	107.525.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				73.442.125		80.786.300		88.864.500		97.750.500		107.525.500		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	16	73.442.125	15	80.786.300	15	88.864.500	15	97.750.500	15	107.525.500		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				72.557.875		79.813.500		87.794.500		96.573.500		106.230.500		
Terwujudnya Kecamatan Taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	72.557.875	14	79.813.500	14	87.794.500	14	96.573.500	14	106.230.500		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				72.557.875		79.813.500		87.794.500		96.573.500		106.230.500		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	72.557.875	14	79.813.500	14	87.794.500	14	96.573.500	14	106.230.500		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan	100	100	1.361.000.000	100	1.518.399.300	100	1.752.338.000	100	1.875.070.000	100	2.077.198.600	7.01.0.00.0.00.04 .0006 -	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ketertiban Umum di Kecamatan	Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)												KELURAHAN BATU AMPAR	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				78.626.000		86.488.500		95.137.000		104.650.500		115.115.500		
Terselenggaranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	16	78.626.000	15	86.488.500	15	95.137.000	15	104.650.500	15	115.115.500		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				78.626.000		86.488.500		95.137.000		104.650.500		115.115.500		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	16	78.626.000	15	86.488.500	15	95.137.000	15	104.650.500	15	115.115.500		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				67.374.000		74.111.000		81.522.000		89.674.000		103.125.100		
Terwujudnya Kecamatan Taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	67.374.000	14	74.111.000	14	81.522.000	14	89.674.000	14	103.125.100		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				67.374.000		74.111.000		81.522.000		89.674.000		103.125.100		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	67.374.000	14	74.111.000	14	81.522.000	14	89.674.000	14	103.125.100		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				290.000.000		333.500.000		378.925.000		424.383.000		482.290.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	290.000.000	100	333.500.000	100	378.925.000	100	424.383.000	100	482.290.000	7.01.0.00.0.00.04 .0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				80.000.000		92.000.000		101.200.000		105.000.000		115.000.000		
Terwujudnya Kecamatan yang Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	200	80.000.000	200	92.000.000	200	101.200.000	200	105.000.000	200	115.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				80.000.000		92.000.000		101.200.000		105.000.000		115.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	200	80.000.000	200	92.000.000	200	101.200.000	200	105.000.000	200	115.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	290.000.000	100	333.500.000	100	378.925.000	100	424.383.000	100	482.290.000	7.01.0.00.0.00.04 .0001 - KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				35.000.000		40.250.000		46.287.500		53.230.500		61.215.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya Kecamatan yang Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	70	35.000.000	70	40.250.000	70	46.287.500	70	53.230.500	70	61.215.000		
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				35.000.000		40.250.000		46.287.500		53.230.500		61.215.000		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	70	35.000.000	70	40.250.000	70	46.287.500	70	53.230.500	70	61.215.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	290.000.000	100	333.500.000	100	378.925.000	100	424.383.000	100	482.290.000	7.01.0.00.0.00.04 .0002 - KELURAHAN KARANG JOANG	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				35.000.000		40.250.000		46.287.500		53.230.500		61.215.000		
Terwujudnya Kecamatan yang Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	80	35.000.000	80	40.250.000	80	46.287.500	80	53.230.500	80	61.215.000		
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				35.000.000		40.250.000		46.287.500		53.230.500		61.215.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	80	35.000.000	80	40.250.000	80	46.287.500	80	53.230.500	80	61.215.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	290.000.000	100	333.500.000	100	378.925.000	100	424.383.000	100	482.290.000	7.01.0.00.0.00.04 .0003 - KELURAHAN GRAHA INDAH	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				35.000.000		40.250.000		46.287.500		53.230.500		61.215.000		
Terwujudnya Kecamatan yang Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	90	35.000.000	90	40.250.000	90	46.287.500	90	53.230.500	90	61.215.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				35.000.000		40.250.000		46.287.500		53.230.500		61.215.000		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	90	35.000.000	90	40.250.000	90	46.287.500	90	53.230.500	90	61.215.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	290.000.000	100	333.500.000	100	378.925.000	100	424.383.000	100	482.290.000	7.01.0.00.0.00.04 .0004 - KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				35.000.000		40.250.000		46.287.500		53.230.500		61.215.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya Kecamatan yang Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	100	35.000.000	100	40.250.000	100	46.287.500	100	53.230.500	100	61.215.000		
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				35.000.000		40.250.000		46.287.500		53.230.500		61.215.000		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	100	35.000.000	100	40.250.000	100	46.287.500	100	53.230.500	100	61.215.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	290.000.000	100	333.500.000	100	378.925.000	100	424.383.000	100	482.290.000	7.01.0.00.0.00.04 .0005 - KELURAHAN MUARA RAPAK	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				35.000.000		40.250.000		46.287.500		53.230.500		61.215.000		
Terwujudnya Kecamatan yang Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	95	35.000.000	95	40.250.000	95	46.287.500	95	53.230.500	95	61.215.000		
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				35.000.000		40.250.000		46.287.500		53.230.500		61.215.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	95	35.000.000	95	40.250.000	95	46.287.500	95	53.230.500	95	61.215.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	290.000.000	100	333.500.000	100	378.925.000	100	424.383.000	100	482.290.000	7.01.0.00.0.00.04 .0006 - KELURAHAN BATU AMPAR	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				35.000.000		40.250.000		46.287.500		53.230.500		61.215.000		
Terwujudnya Kecamatan yang Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	150	35.000.000	150	40.250.000	150	46.287.500	150	53.230.500	150	61.215.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				35.000.000		40.250.000		46.287.500		53.230.500		61.215.000		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	150	35.000.000	150	40.250.000	150	46.287.500	150	53.230.500	150	61.215.000		

4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

IKU ditetapkan sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk satu periode kedepan. Berikut ini disajikan tabel IKU dari Kecamatan Balikpapan Utara.

**Tabel 4.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025-2029**

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	88,85	89,08	89,31	95,54	89,77	90,00	
2	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,04	72,50	72,75	73,00	73,50	74,00	

4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan atau kebijakan publik. IKK membantu dalam:

- 1) **Mengukur capaian program dan kegiatan:** Seberapa jauh program-program yang telah direncanakan (misalnya pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, atau pendidikan) berhasil dilaksanakan dan mencapai targetnya.

- 2) **Mengevaluasi kinerja birokrasi:** Seberapa efisien dan efektif aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- 3) **Mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti:** Data dari IKK menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih tepat dan terarah, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan.
- 4) **Meningkatkan akuntabilitas publik:** Dengan adanya IKK, masyarakat dapat melihat dan menilai sendiri kinerja pemerintah, sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas.

IKK dengan IKU merupakan hal yang berbeda. IKU cenderung fokus pada hasil akhir (*outcome*) dan dampak (*impact*) yang lebih luas, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau tingkat kemiskinan. Sementara itu, IKK lebih fokus pada proses, *output*, dan efisiensi kegiatan yang mendukung pencapaian IKU tersebut.

Berikut ini disajikan tabel IKK dari Kecamatan Balikpapan Utara.

**Tabel 4.3**  
**Indikator Kinerja Kunci**  
**Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025-2029**

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	88,85	89,08	89,31	95,54	89.77	90,00	Indikator Tujuan
2.	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,04	72,50	72,75	73,00	73,50	74,00	Indikator Sasaran

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	Indikator Program
5.	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemerintah Pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	%	18	19	20	21	22	23	Indikator Program
6.	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	Indikator Program
7.	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	Indikator Program
8.	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	Indikator Program
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	83	84	85	86	87	88	Indikator Program

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Catatan Penting**

Sesuai dengan rencana kerja yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Balikpapan Utara tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Balikpapan Utara. Tanpa adanya kerja sama yang baik dan harmonis maka pencapaian target tidak ada optimal.
- b. Apabila dalam pelaksanaan terdapat ketidaksesuaian (contoh tidak ada ketersediaan anggaran) dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam rencana strategis, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Optimalisasi peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang memfokuskan pada usaha peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat secara luas.

#### **5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025-2029, merupakan perencanaan lima tahunan yang sifatnya operasional yang menjadi pedoman dalam perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Seksi, Subbag, Kelurahan dan seluruh staf Kecamatan Balikpapan Utara secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
  - a. melaksanakan Renstra dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
  - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

### **5.3 Rencana Tindak Lanjut**

Dengan ditetapkan Renstra Tahun 2025-2029, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balikpapan Utara yang disusun per tahun.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan ini, besar harapan kami agar seluruh program, kegiatan dan subkegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik serta membawa kemajuan signifikan bagi pembangunan di wilayah kecamatan Balikpapan Utara. Keberhasilan implementasinya tentu sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan agar bersama wujudkan visi-misi Pemerintah Kota Balikpapan demi kesejahteraan masyarakat.

## AG. KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, Kecamatan Balikpapan Selatan sebagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kecamatan. Perkembangan dinamika pembangunan kota yang semakin kompleks menuntut adanya perencanaan yang terarah, terpadu, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, baik di tingkat kota maupun nasional.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025–2029 merupakan tindak lanjut dari ketentuan dalam **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional** serta **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Dokumen ini juga menjadi penjabaran lebih lanjut dari **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025–2029**, sekaligus mendukung visi dan misi Wali Kota Balikpapan.

Kecamatan Balikpapan Selatan memiliki posisi penting sebagai simpul pelayanan terdepan kepada masyarakat. Fungsi kecamatan tidak hanya terbatas pada fasilitasi administrasi pemerintahan, tetapi juga meliputi pelayanan publik, koordinasi pembangunan di tingkat kelurahan, serta penguatan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan di tingkat kecamatan akan sangat menentukan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan 2025–2029 disusun dengan memperhatikan berbagai isu strategis, tantangan, serta peluang yang dihadapi. Berdasarkan hasil identifikasi, kebutuhan utama yang harus diperkuat meliputi: peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kapasitas aparatur kecamatan dan kelurahan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor.

Dengan alokasi pendanaan yang cukup signifikan sebagaimana tergambar dalam rencana program dan kegiatan, Kecamatan Balikpapan Selatan berkomitmen untuk melaksanakan berbagai program prioritas, mulai dari peningkatan layanan administrasi internal, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, hingga pemeliharaan sarana prasarana pendukung. Semua upaya ini diarahkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), peningkatan kualitas pelayanan, serta kesejahteraan masyarakat Balikpapan Selatan.

#### 1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan tahun 2025-2029 memiliki dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 20);
24. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 54);
25. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2045.

26. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 57).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### **Maksud**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai:

1. Pedoman bagi Kecamatan Balikpapan Selatan dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya selama periode 2025–2029.
2. Alat kendali untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan pembangunan kecamatan dengan dokumen perencanaan daerah yang lebih tinggi, khususnya RPJMD Kota Balikpapan 2025–2029.
3. Instrumen akuntabilitas publik yang menjamin transparansi dan kejelasan arah pembangunan di Kecamatan Balikpapan Selatan.
4. Dasar dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja), dan dokumen perencanaan tahunan lainnya.

#### **Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan 2025–2029 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kota Balikpapan ke dalam strategi dan program kerja di tingkat kecamatan.
2. Merumuskan prioritas pembangunan kecamatan berdasarkan isu strategis, potensi wilayah, dan kebutuhan masyarakat.
3. Menjadi acuan dalam pengalokasian sumber daya, baik anggaran, aparatur, maupun sarana prasarana, secara efektif dan efisien.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Balikpapan Selatan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I      PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas tentang isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

**BAB II      GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN**

Menjelaskan gambaran umum tentang peran (tugas dan fungsi) sebagai perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

**BAB III     PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN**

Menjelaskan gambaran tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Balikpapan Selatan, telaahan visi, misi dan program Wali Kota terpilih, telaahan RPJMD Kota Balikpapan, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

**BAB IV     TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Balikpapan Selatan

**BAB V      STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN**

Memuat tentang strategi dan kebijakan pelaksanaan kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Selatan.

**BAB VI     RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN**

Memuat tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan pelaksanaan kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Selatan selama 5 (lima) Tahun.

**BAB VII    KINERJA PENYELENGGARAAN KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN**

Menyajikan indikator kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Balikpapan.

**BAB VIII   PENUTUP**

Memuat tentang kesimpulan Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan tahun 2025-2029.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Balikpapan Selatan

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa sistem perencanaan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas-Bawah dan Bawah-Atas. Secara politik, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau perangkat daerah yang secara fungsional bertugas untuk penyusunan perencanaan. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Secara umum penyelenggaraan pelayanan publik melalui Kecamatan Balikpapan Selatan mengalami peningkatan kualitas, ditandai dengan fenomena meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui Musrenbang, partisipasi masyarakat dalam peningkatan nilai swadaya dan peningkatan nilai indeks kepuasan layanan publik. Kesemuanya adalah bukti bahwa tingkat kepercayaan masyarakat yang baik akan mendorong berkembangnya wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan menjadi lebih baik

##### 2.1.1 Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Perwali Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- e. pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
- j. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;

- k. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**a) Uraian Tugas dan Fungsi Camat Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016**

- 1. Menyelenggarakan tugas dan fungsi kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
- 2. Penyelenggaraan urusan pemerintah umum;
- 3. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 4. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
- 5. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan;
- 6. Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- 7. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- 8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- 9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- 10. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah kecamatan;
- 11. Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- 12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 13. Mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- 14. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b) Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaris Camat Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016**

- 1. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- 2. Pengoordinasian penyusunan dan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- 3. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- 4. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketalaksanaan dan kearsipan;
- 5. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- 6. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- 7. Pengelolaan anggaran kecamatan dan penerimaan retribusi;
- 8. Pelaksanaan administrasi keuangan;
- 9. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- 10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- 11. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c) Uraian Tugas dan Fungsi Kasi Pemerintahan Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016**

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan;
2. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah kecamatan;
3. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kependudukan di wilayah kecamatan;
4. Memfasilitasi permasalahan pertanahan di wilayah kecamatan;
5. Melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan;
6. Memfasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan;
7. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintah di kelurahan;
8. Menyusun dokumen monografi kecamatan;
9. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
11. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**d) Uraian Tugas dan Fungsi Kasi Pembangunan masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016**

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pembangunan masyarakat;
2. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
3. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan;
4. Memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian;
5. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
6. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
7. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah;
8. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
9. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program pembangunan kelurahan dan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
10. Menyusun dokumen profil kecamatan;
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**e) Uraian Tugas dan Fungsi Kasi Trantib dan LH Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016**

1. Menyusun program dan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
2. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketentraman, ketertiban dan kemasyarakatan;
3. Melaksanakan pengawasan rumah sewa / pondokan;
4. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;

5. Melaksanakan pengoordinasian pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin;
6. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perijinan di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan;
8. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
9. Memfasilitasi permasalahan ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
10. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketentraman dan ketertiban wilayah serta antisipasi bencana alam;
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**f) Uraian Tugas dan Fungsi Kasi Kesos Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016**

1. Menyusun program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial;
2. Memfasilitasi penanggulangan bencana, pasca bencana dan pengungsi serta masalah sosial;
3. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
4. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
5. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama;
6. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
7. Melaksanakan fasilitasi pembinaan program usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

**g) Uraian Tugas dan Fungsi Kasi Pelayanan Publik Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016**

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pelayanan publik;
2. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
3. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
4. Menyusun Standar Pelayanan;
5. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan
6. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu
7. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
8. Mengelola layanan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan
9. Memfasilitasi dan menindaklanjuti hasil pengaduan warga terhadap pelayanan;



10. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
11. Melaksanakan tatakelola pelayanan publik
12. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
13. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketentraman, ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
14. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelayanan pada kelurahan;
15. Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
16. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
17. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
18. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**h) Uraian Tugas dan Fungsi Kasubbag Umum Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016**

1. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
2. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
3. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
4. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
5. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
6. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
7. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
8. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik daerah;
9. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
10. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
11. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
12. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
13. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
14. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
15. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**i) Uraian Tugas dan Fungsi Kasubbag Program dan Keuangan Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016**

1. melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan yang meliputi : rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja tahunan, penetapan kinerja, dan laporan kinerja;
2. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
3. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
4. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

5. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
6. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran
7. mengoordinir penyusunan RKA/DPA SKPD
8. melaksanakan sistim akuntansi pengelolaan keuangan SKPD;
9. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
10. mengoordinir dan meneliti anggaran;
11. menyusun laporan keuangan kecamatan;
12. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
13. mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
14. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasam sesuai dengan bidang tugasnya.

**j) Uraian Tugas dan Fungsi Lurah Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016**

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup dalam satu wilayah kelurahan yang berada di wilayah kerja kelurahan.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
3. Pelaksanaan Program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
5. Penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
6. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
7. Penyelenggaraan administrasi pendudukan;
8. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
9. Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
10. Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;
11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
12. Mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
13. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

**k) Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat kelurahan Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016**

1. melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi : rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja tahunan, penetapan kinerja, dan laporan kinerja;
2. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
3. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;

4. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
5. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
6. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
7. mengoordinir penyusunan RKA/DPA SKPD;
8. melaksanakan sistim akuntansi pengelolaan keuangan SKPD;
9. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
10. mengoordinir dan meneliti anggaran;
11. menyusun laporan keuangan kelurahan;
12. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
13. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
14. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
15. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
16. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
17. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
18. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik daerah;
19. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
20. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
21. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
22. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
23. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
24. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
25. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
26. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**1) Uraian Tugas dan Fungsi Kasi Pemerintahan dan pelayanan publik kelurahan Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016**

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
3. Penyelenggarakan pengelolaan administrasi kependudukan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
4. Melaksanakan administrasi pertanahan;
5. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
6. Melaksanakan pembinaan rukun tetangga;
7. Menyusun dokumen monografi kelurahan;
8. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
9. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
10. Menyusun Standar Operasional dan Prosedur pelayanan dan menyusun Standar Pelayanan lingkup kelurahan;
11. Penyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan
12. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
13. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;

14. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan;
15. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
16. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketentraman, ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
17. Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
18. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
19. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
20. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**m) Uraian Tugas dan Fungsi Kasi Trantib & Lingkungan hidup kelurahan Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016**

1. Menyusun program dan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
2. Melaksanakan layanan bidang ketentraman dan ketertiban serta layanan surat pengantar izin pertunjukan dan keramaian;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
4. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perijinan;
5. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;
6. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
7. Memfasilitasi permasalahan ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
8. Melaksanakan koordinasi ketentrama, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup dengan instansi terkait, lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan rukun tetangga;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**n) Uraian Tugas dan Fungsi Kasi Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016**

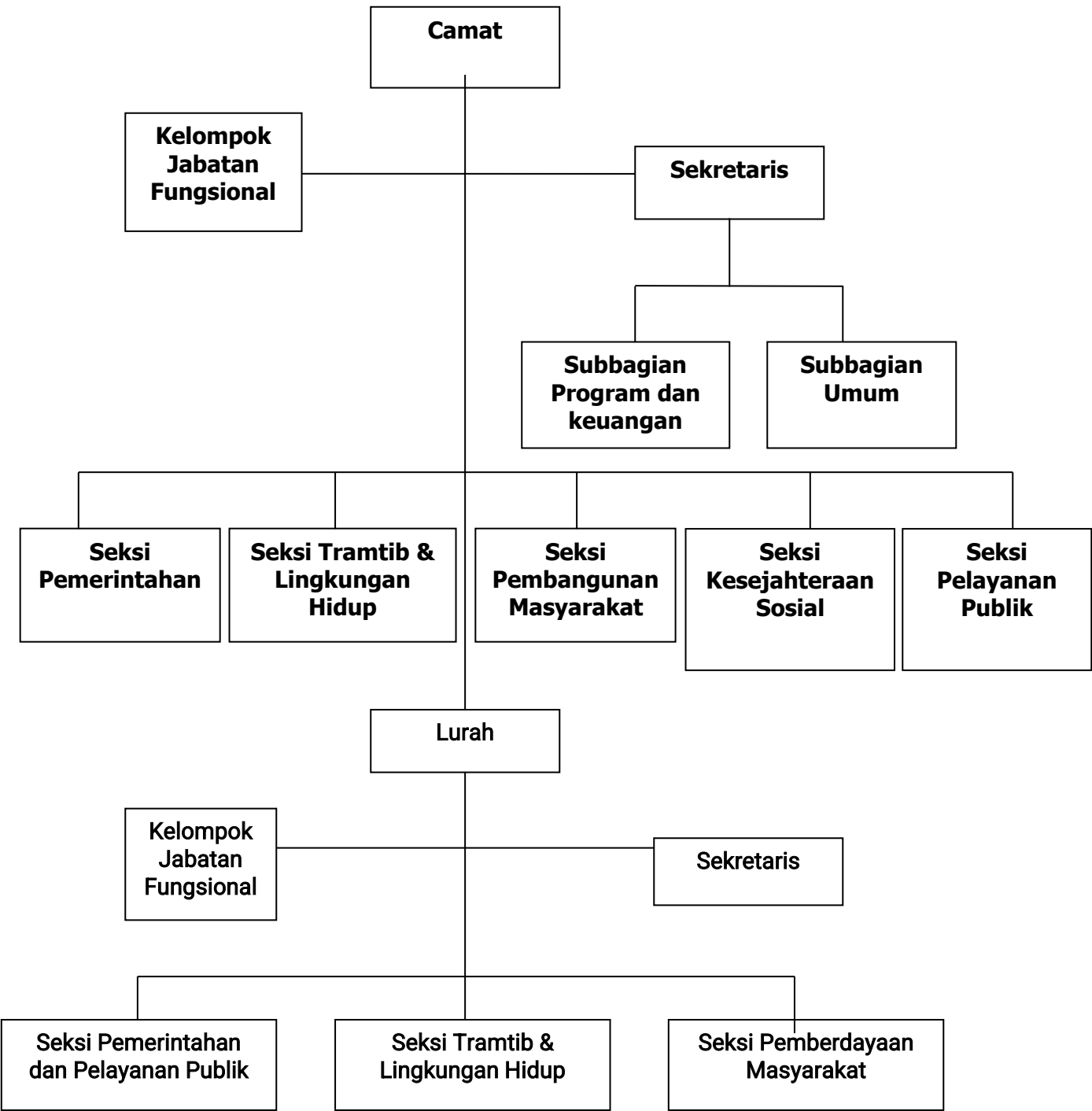
1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
2. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan;
3. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan
5. Melaksanakan pembinaan penataan pembangunan pemukiman penduduk;
6. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan;
7. Melaksanakan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
8. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama;
9. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan;

10. Melaksanakan fasilitasi pendataan masyarakat rentan masalah sosial dan keluarga miskin;
11. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial;
12. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
13. Melaksanakan fasilitasi pembinaan program usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
14. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kegiatan/program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
15. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha kesejahteraan rakyat
16. Melaksanakan fasilitasi penanggulangan korban bencana
17. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
18. Melaksanakan penyusunan profil kelurahan;
19. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
20. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Bagan Struktur organisasi Kecamatan Balikpapan Selatan adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Selatan



Dasar : Peraturan Wali Kota Balikpapan  
Nomor : 57 Tahun 2016  
Tanggal : 28 Desember 2016

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Kecamatan Balikpapan Selatan sebagai Unit Pelayanan Publik yang berkualitas baik dan akuntabel.

Komposisi pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan beberapa kriteria pada tahun 2025 adalah sebagaimana tertera pada Tabel-Tabel berikut.

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jabatan	Jumlah		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN				
1	Camat	1		1
2	Sekretaris Kecamatan	1		1
3	Kepala Seksi Pemerintahan		1	1
4	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial		1	1
5	Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat	1		1
6	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1		1
7	Kepala Seksi Pelayanan Publik	1		1
8	Kasubbag Umum	1		1
9	Kasubbag Program dan Keuangan		1	1
10	Pelaksana	4	8	12
11	PPPK (Pengadministrasi/Operasional)		1	1
12	Tenaga Bantuan (Naban)	5	4	9
KELURAHAN SEPINGGAN				
1	Lurah	1		1
2	Sekretaris Kelurahan		1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat		1	1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1		1
6	Pelaksana			
7	PPPK (Pengadministrasi/Operasional)		3	3
8	Tenaga Bantuan (Naban)		1	1
KELURAHAN SEPINGGAN RAYA				
1	Lurah	1		1
2	Sekretaris Kelurahan			0
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	1

4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat		-	-
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1		1
6	Pelaksana	2		2
7	PPPK (Pengadministrasi/Operasional)		3	3
8	Tenaga Bantuan (Naban)		1	1
<b>KELURAHAN SEPINGGAN BARU</b>				
1	Lurah	1		1
2	Sekretaris Kelurahan		1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat		1	1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1		1
6	Pelaksana		1	1
7	PPPK (Pengadministrasi/Operasional)	1	2	3
8	Tenaga Bantuan (Naban)		1	1
<b>KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA</b>				
1	Lurah	1		1
2	Sekretaris Kelurahan	1		1
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat		1	1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1		1
6	Pelaksana	1		1
7	PPPK (Pengadministrasi/Operasional)	2	2	4
8	Tenaga Bantuan (Naban)		1	1
<b>KELURAHAN SUNGAI NANGKA</b>				
1	Lurah	1		1
2	Sekretaris Kelurahan		1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat			0
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1		1
6	Pelaksana	1	3	4
7	PPPK (Pengadministrasi/Operasional)		4	4
8	Tenaga Bantuan (Naban)		2	2
<b>KELURAHAN DAMAI BAHAGIA</b>				
1	Lurah		1	1
2	Sekretaris Kelurahan		1	1



3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat		1	1
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1		1
6	Pelaksana		2	2
7	PPPK (Pengadministrasi/Operasional)	2	1	3
8	Tenaga Bantuan (Naban)		1	1
<b>KELURAHAN DAMAI BARU</b>				
1	Lurah	1		1
2	Sekretaris Kelurahan		1	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat			0
5	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	1	3	4
6	Pelaksana	3		3
7	PPPK (Pengadministrasi/Operasional)		4	4
8	Tenaga Bantuan (Naban)		2	2
	<b>TOTAL PEGAWAI</b>	<b>42</b>	<b>65</b>	<b>107</b>

Sumber : Data Kepegawaian Agustus 2025

**Tabel 2.3.**  
**REKAPITULASI PNS BERDASARKAN GOLONGAN**

No	Unit Kerja	Golongan			
		IV	III	II	I
1.	Kecamatan Balikpapan Selatan	2	15	4	0
2.	Kelurahan Sepinggian	1	4	0	0
3.	Kelurahan Sepinggian Raya	0	5	0	0
4.	Kelurahan Sepinggian Baru	0	5	1	0
5.	Kelurahan Gunung Bahagia	2	3	1	0
6.	Kelurahan Sungai Nangka	0	5	1	0
7.	Kelurahan Damai Bahagia	0	5	2	0
8.	Kelurahan Damai Baru	0	5	2	0
	<b>TOTAL PEGAWAI</b>	<b>5</b>	<b>47</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

Sumber : Data Kepegawaian Agustus 2025

**Tabel 2.4**  
**REKAPITULASI PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

No	Unit Kerja	Pendidikan					
		S2	S1/D4	D3	SLTA	SLTP	SD
1.	Kecamatan Balikpapan Selatan	2	11	0	6	2	0

2.	Kelurahan Sepinggan	2	2	1	0	0	0
3.	Kelurahan Sepinggan Raya	0	1	0	4	0	0
4.	Kelurahan Sepinggan Baru	0	2	4	0	0	0
5.	Kelurahan Gunung Bahagia	2	0	2	2	0	0
6.	Kelurahan Sungai Nangka	0	1	0	4	1	0
7.	Kelurahan Damai Bahagia	0	3	1	3	0	0
8.	Kelurahan Damai Baru	0	4	0	3	0	0
	<b>TOTAL PEGAWAI</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Sumber : Data Kepegawaian Agustus 2025

a) Aset

Sarana dan Prasarana pendukung sangat diperlukan bagi Kecamatan sebagai suatu unit pelayanan publik untuk memberikan pelayanan kinerja. Aset yang masih operasional adalah :

**Tabel 2.5**  
**Aset Kecamatan dan Kelurahan Balikpapan Selatan**

Uraian	2025	2024
<b>ASET</b>	<b>15.618.097.712.441,19</b>	<b>14.867.479.671.916,37</b>
<b>ASET TETAP</b>	<b>11.604.080.665.196,92</b>	<b>11.190.632.943.972,62</b>
Tanah	5.382.278.050.303,78	5.382.278.050.303,78
Tanah	5.382.278.050.303,78	5.382.278.050.303,78
Peralatan dan Mesin	1.948.875.094.477,34	1.845.484.517.682,34
Alat Besar	140.246.409.096,18	136.333.647.560,18
Alat Angkutan	297.906.645.447,54	295.768.796.657,54
Alat Bengkel dan Alat Ukur	20.124.368.131,80	19.815.932.991,80
Alat Pertanian	35.879.668.389,45	35.879.668.389,45
Alat Kantor dan Rumah Tangga	658.670.787.399,44	590.696.031.491,44
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	107.384.941.059,44	97.299.996.822,44
Alat Kedokteran dan Kesehatan	149.898.747.259,92	149.822.156.759,92
Alat Laboratorium	76.070.632.926,45	74.838.495.926,45
Alat Persenjataan	3.291.035.940,61	3.291.035.940,61
Komputer	311.941.269.781,35	295.222.561.643,35
Alat Eksplorasi	252.406.413,00	252.406.413,00
Alat Pengeboran	136.400.000,00	136.400.000,00
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	567.099.503,00	567.099.503,00
Alat Bantu Eksplorasi	97.142.760,00	97.142.760,00
Alat Keselamatan Kerja	6.240.278.405,00	6.127.372.645,00
Alat Peraga	22.000.000,00	22.000.000,00
Peralatan Proses/Produksi	267.224.620,00	267.224.620,00
Rambu-rambu	135.084.131.074,16	134.252.641.288,16
Peralatan Olahraga	4.793.906.270,00	4.793.906.270,00

Uraian	2025	2024
Gedung dan Bangunan	2.992.820.064.123,04	2.959.176.638.065,00
Bangunan Gedung	2.883.441.776.368,82	2.851.805.318.535,88
Monumen	4.147.159.239,81	4.147.159.239,81
Bangunan Menara	762.134.303,44	762.134.303,44
Tugu Titik Kontrol/Pasti	104.468.994.210,97	102.462.025.985,87
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.785.137.568.810,22	5.508.759.727.538,96
Jalan dan Jembatan	3.997.903.567.903,86	3.811.956.020.503,22
Bangunan Air	1.474.560.866.276,36	1.463.984.810.020,16
Instalasi	92.182.422.686,92	83.665.636.441,50
Jaringan	220.490.711.943,08	149.153.260.574,08
Aset Tetap Lainnya	73.247.284.728,95	73.211.407.628,95
Bahan Perpustakaan	48.175.625.609,50	48.150.626.509,50
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.659.642.494,00	1.648.764.494,00
Tanaman	15.112.158.170,84	15.112.158.170,84
Aset Tetap Dalam Renovasi	8.299.858.454,61	8.299.858.454,61
Konstruksi Dalam Pengerjaan	340.858.259.793,03	340.858.259.793,03
Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	340.858.259.793,03	340.858.259.793,03
Akumulasi Penyusutan	(4.919.135.657.039,44)	(4.919.135.657.039,44)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.279.568.272.002,22)	(1.279.568.272.002,22)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(684.948.617.994,08)	(684.948.617.994,08)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(2.946.303.670.238,11)	(2.946.303.670.238,11)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(8.315.096.805,03)	(8.315.096.805,03)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>11.604.080.665.196,92</b>	<b>11.190.632.943.972,62</b>

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Selatan

Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan tertuang dalam Renstra, Berdasarkan Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang diukur melalui 3 (tiga) indikator sasaran. Berdasarkan pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Selatan

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKAT OR KINERJA	2021		2022		2023		2024	
			REALISA SI	CAPAI AN	REALISA SI	CAPAI AN	REALISA SI	CAPAI AN	REALISA SI	CAPAI AN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	79.79	n/a	81.11	100.76 %	80.92	99.90%	81.33	98.58%
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	65.08	n/a	69.2	100.29 %	69.22	98.88%	70.31	96.32%

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2024

Dari tabel 2.8 diatas dapat disimpulkan bahwa target RENSTRA pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 - 2025 dapat tercapai, dengan kata lain kinerja Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Balikpapan Selatan memiliki kategori Baik. Bahkan untuk beberapa kegiatan tertentu capaian kinerjanya sesuai target kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan capaian Kinerja pada periode RENTRA sebelumnya ini dapat dijadikan acuan dalam menentukan target pada RENSTRA selanjutnya dan dapat dijadikan pendorong untuk kinerja selanjutnya agar menjadi lebih baik.

#### 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Kecamatan Balikpapan Selatan sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi pelayanan publik memiliki kelompok sasaran layanan yang luas dan beragam. Kelompok sasaran tersebut merupakan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan pelayanan yang diselenggarakan oleh kecamatan.

Secara umum, kelompok sasaran layanan Kecamatan Balikpapan Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Masyarakat Umum/Warga Kecamatan**
  - o Seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan, baik penduduk tetap maupun pendatang.
  - o Sasaran utama dalam pelayanan administrasi kependudukan (surat keterangan domisili, pengantar KTP, KK, akta, dan lain-lain).
  - o Masyarakat sebagai penerima manfaat dalam layanan ketentraman, ketertiban umum, dan pemberdayaan masyarakat.
2. **Kelompok Rentan dan Berkebutuhan Khusus**
  - o Masyarakat miskin dan kurang mampu.
  - o Anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas yang membutuhkan perlindungan serta perhatian khusus dalam layanan publik.
  - o Kelompok terdampak bencana, baik bencana alam maupun non-alam, yang memerlukan fasilitasi penanganan darurat maupun bantuan sosial.
3. **Lembaga Kemasyarakatan**
  - o RT, LPM, PKK, Karang Taruna, dan organisasi kemasyarakatan lain sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial kemasyarakatan.
  - o Kelompok ini berperan penting dalam menjembatani aspirasi masyarakat serta pelaksanaan program pemerintah di tingkat kecamatan maupun kelurahan.
4. **Dunia Usaha dan Pelaku Ekonomi Lokal**
  - o UMKM, pelaku usaha mikro, pedagang kecil, dan sektor jasa yang membutuhkan dukungan pelayanan perizinan, pemberdayaan ekonomi, serta fasilitasi kegiatan usaha.
  - o Perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah kecamatan, sebagai mitra dalam pelaksanaan program CSR (Corporate Social Responsibility) dan pembangunan wilayah.
5. **Instansi Pemerintah dan Stakeholder Terkait**
  - o Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang bersinergi dengan kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan.
  - o Aparat keamanan (Polsek, Koramil), lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, serta lembaga vertikal lain yang beroperasi di wilayah kecamatan.

Dengan demikian, kelompok sasaran layanan Kecamatan Balikpapan Selatan mencakup seluruh komponen masyarakat dan pemangku kepentingan yang berada di wilayah kecamatan. Identifikasi kelompok sasaran ini menjadi penting agar pelayanan yang diberikan dapat tepat guna, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Balikpapan Selatan

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Balikpapan Selatan

Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima, Kecamatan Balikpapan Selatan menghadapi sejumlah permasalahan yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.7

Permasalahan DI Kecamatan Balikpapan Selatan

NO	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah
1	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat serta Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan Balikpapan Selatan	Belum optimalnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1. Minimnya Sarpas Pelayanan 2. Minimnya Kuantitas dan Kualitas SDM 3. Belum terbangunnya integrasi pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan
		Masih rendahnya keterlibatan komponen masyarakat dalam pembangunan	Minimnya Akses, kurangnya sosialisasi tentang pentingnya partisipasi Masyarakat dalam pembangunan
		Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif	Minimnya Akses, kurangnya sosialisasi tentang pentingnya partisipasi Masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif
		Masih tingginya kasus Pencemaran Lingkungan	1. Pengelolaan sampah yang kurang maksimal 2. Pelanggaran Site Plant 3. Pelanggaran Tata Ruang 4. Warga Membuang Sampah 5. Limbah Industri
		Kurang ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum	1. Keterbatasan Lahan 2. Keterbatasan Anggaran 3. Perencanaan kegiatan yag kurang baik
		Meningkatnya Jumlah Penduduk dan Mobilitas Masyarakat	Tuntutan Pelayanan yang cepat dan responsif terhadap tingginya mobilitas warga

2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi gambaran pelayanan serta berbagai permasalahan yang dihadapi, maka terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus dalam rangka peningkatan kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan. Isu strategis tersebut antara lain:

Tabel 2. 1

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Balikpapan Selatan

NO	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
	(Kewenangan PD)	(Sumber dari data capaian kinerja periode sebelumnya) Gap capaian dan ekspektasi	(KLHS RPJMD/Ranwal)	Global	Nasional	Regional	Kesimpulan
				Indikator Global	Indikator Nasional	Indikator Lokal	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	Belum optimalnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	masih adanya pelanggaran terhadap peraturan pemerintah	Perubahan Iklim, Urbanisasi/Mobilitas Masyarakat Internalisasional	Pembangunan Ibukota Negara Nusantara(IKN)	Isu Strategis dalam RPJMD Kota Balikpapan: Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Tingkat Kecamatan
		Masih rendahnya keterlibatan komponen masyarakat dalam pembangunan					
		Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif					
		Masih tingginya kasus Pencemaran Lingkungan					

NO	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
	(Kewenangan PD)	(Sumber dari data capaian kinerja periode sebelumnya) Gap capaian dan ekspektasi	(KLHS RPJMD/Ranwal)	Global	Nasional	Regional	Kesimpulan
		Kurang ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum					
		Meningkatnya Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat					
		Meningkatnya Jumlah Penduduk dan Mobilitas Masyarakat					
		Belum optimalnya penanganan bencana					
		Relokasi Gedung kantor kelurahan karena sudah tidak representatif					



## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai tindak lanjut dari identifikasi isu strategis pada Bab II, maka diperlukan perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Balikpapan Selatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Perumusan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

#### 3.1 Tujuan Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Selatan

Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Balikpapan Selatan dalam urusan pelayanan publik, maka tujuan jangka menengah yang ditetapkan pada Kecamatan Balikpapan Selatan dapat diuraikan sebagai berikut :

**“Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan”**

#### 3.2 Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Selatan

Untuk mencapai Tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan indikator- indikator sebagai alat untuk mengukur hasil pencapaian kinerja yang telah dilakukan. Indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

**“Meningkatnya kualitas koordinasi dan fungsi kewilayahan di tingkat kecamatan”**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Balikpapan Selatan beserta indikator kinerjanya dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3. 1

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN</b>											
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	81,33	81,5	81,75	82	82,25	82,5	82,75	
		Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan (%)	100	85,71	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70,31	71,22	71,98	72,73	73,49	74,24	75	

3.3 Strategi Kecamatan Balikpapan Selatan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025 – 2029

Strategi yang akan ditempuh Kecamatan Balikpapan Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk penguatan fungsi koordinasi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan berbasis kewilayahan serta penguatan ketentraman dan ketertiban umum sebagai bagian integrasi dari urusan pemerintahan umum dengan melakukan pentahapan strategi sebagai berikut:

**Tabel 3. 2**  
**Pentahapan Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan**

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Pembangunan Wisata Kuliner Taman 3 Generasi	Pembangunan Wisata Kuliner Taman 3 Generasi	Pelaksanaan Kegiatan Car Free Day di Wilayah Jalan Ruhui Rahayu	Pembanguann Ruang Terbuka di Wilayah Balikpapan Baru	Pengelolaan Danau Poka/Area Wisata Pemancingan

3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Balikpapan Selatan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025 – 2029

Arah kebijakan pembangunan Kecamatan Balikpapan Selatan ditetapkan sebagai pedoman operasional dalam penyusunan program dan kegiatan yang difokuskan pada terwujudnya penyelenggaraan urusan kewilayahan yang efektif, adaptif, dan akuntabel, dengan prioritas pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan akses dan mutu pelayanan publik, sinergi antar pemangku kepentingan, serta pengembangan inovasi pelayanan sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Kebijakan ini disusun untuk memastikan kesinambungan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat kewilayahan, sehingga seluruh tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan dapat dicapai secara terukur, efektif, dan berkelanjutan. Adapun Arah Kebijakan Kecamatan Balikpapan Selatan sebagai mana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3. 3

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan PD	Keterangan
1	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Pengembangan SPBE untuk meningkatkan kualitas pelayanan	Penguatan Pelayanan Publik	
			Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	
			Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	
			Penguatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan	
			Pengembangan Sumber Daya Manusia Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan sebagaimana telah dirumuskan pada Bab III, Kecamatan Balikpapan Selatan menetapkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi instrumen operasional penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan.

Program, kegiatan, dan subkegiatan tersebut disusun dengan memperhatikan:

1. **Kebijakan nasional, provinsi, dan kota**, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025–2029, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. **Kewenangan kecamatan** sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota, khususnya dalam bidang penyelenggaraan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, serta urusan pemerintahan umum.
3. **Isu strategis, tujuan, dan sasaran pembangunan kecamatan** yang telah diidentifikasi pada bab sebelumnya, sehingga program dan kegiatan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan yang dihadapi Kecamatan Balikpapan Selatan.
4. **Prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas** dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pelayanan, serta partisipasi aktif masyarakat.

Dengan dasar tersebut, Bab IV ini akan menguraikan secara rinci program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Balikpapan Selatan, beserta indikator kinerjanya. Hal ini dimaksudkan agar arah pembangunan kecamatan menjadi lebih terarah, terukur, serta mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kota Balikpapan secara keseluruhan.

#### 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Untuk memastikan keterkaitan yang jelas antara tujuan, sasaran, serta langkah operasional dalam Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Selatan, diperlukan teknik perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan yang sistematis, terukur, dan sesuai ketentuan perencanaan pembangunan daerah. Tabel berikut menyajikan teknik penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan tahun 2025–2029.

Tabel 4. 1

Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN							
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)		
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terwujudnya profesionalisme aparatur perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terwujudnya layanan umum perkantoran perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.			
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terwujudnya operasional umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar berfungsi optimal	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGA N
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					dibayarkan Pajaknya (Unit)	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan			Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan (%)		
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan  Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang Berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				(PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan			
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan		Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)		
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Tercapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	7.01.03.2.03.0005 - Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
					Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)		
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial		Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0001 - KELURAHAN DAMAI BAHAGIA</b>							
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan  Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan		Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGA N
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGA N
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kelurahan (Pokmas / Ormas)		
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Tercapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial		Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0002 - KELURAHAN SEPINGGAN RAYA</b>							
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan  Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan		Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				masyarakat di kelurahan			
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Tercapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		Persentase Pengaduan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial		Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

[illegible]

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan  Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan		Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Tercapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Republik Indonesia (Laporan)		
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial		Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0004 - KELURAHAN SEPINGGAN BARU</b>							
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan  Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGA N
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan		Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGA N
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kelurahan (Pokmas / Ormas)		
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Tercapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial		Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0005 - KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA</b>							
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan  Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan		Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				masyarakat di kelurahan			
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Tercapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		Persentase Pengaduan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial		Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	





NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terselenggaranya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan  Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan		Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Tercapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Republik Indonesia (Laporan)		
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial		Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0007 - KELURAHAN SUNGAI NANGKA</b>							
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan  Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan		Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGA N
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kelurahan (Pokmas / Ormas)		
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Tercapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial		Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGA N
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

#### 4.2 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan 2025–2029, disusun rencana program, kegiatan, dan subkegiatan beserta pendanaan indikatif sebagai acuan pelaksanaan pembangunan di tingkat kewilayahan. Tabel berikut menyajikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan dengan alokasi pendanaan.

Tabel 4. 2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				50.086. 804.000		50.121. 018.000		52.627. 069.000		53.679. 610.000		55.289. 998.000		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				24.456. 416.204		27.419. 518.000		28.574. 569.000		28.879. 110.000		29.480. 998.000		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggar aan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan,	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	75,98	77	24.456. 416.204	78	27.419. 518.000	79	28.574. 569.000	80	28.879. 110.000	81	29.480. 998.000	7.01.0.00.0. 00.05.0000 - KECAMATA N BALIKPAPA N SELATAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah														
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17.974.820		21.000.000		24.000.000		26.000.000		30.000.000		
Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	3	17.974.820	3	21.000.000	3	24.000.000	3	26.000.000	3	30.000.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	4	4				4		4		5			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Daerah (Dokumen)													
7.01.01.2.01.0 001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9.982.8 20		10.000. 000		12.000. 000		13.000. 000		15.000. 000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	9.982.8 20	4	10.000. 000	4	12.000. 000	4	13.000. 000	5	15.000. 000		
7.01.01.2.01.0 007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.992.0 00		11.000. 000		12.000. 000		13.000. 000		15.000. 000		
Terlaksanany a Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	0	3	7.992.0 00	3	11.000. 000	3	12.000. 000	3	13.000. 000	3	15.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Daerah (Laporan)													
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.557. 302.000		15.559. 518.000		16.461. 569.000		16.539. 610.000		16.810. 998.000		
Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bula n)	69	102	14.557. 302.000	102	15.559. 518.000	102	16.461. 569.000	102	16.539. 610.000	102	16.810. 998.000		
7.01.01.2.02.0 001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.557. 302.000		15.559. 518.000		16.461. 569.000		16.539. 610.000		16.810. 998.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	69	102	14.557. 302.000	102	15.559. 518.000	102	16.461. 569.000	102	16.539. 610.000	102	16.810. 998.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tunjangan ASN (Orang/bula n)													
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.200.9 54.500		1.320.0 00.000		1.350.0 00.000		1.370.0 00.000		1.400.0 00.000		
Terwujudnya profesionalis me aparatur perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementas i Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	0	122	1.200.9 54.500	102	1.320.0 00.000	102	1.350.0 00.000	102	1.370.0 00.000	102	1.400.0 00.000		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapa n (Paket)	0	107				70				70			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapann ya				100.954 .500		70.000. 000		80.000. 000		90.000. 000		100.000 .000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapa n (Paket)	0	107	100.954 .500	70	70.000. 000	70	80.000. 000	70	90.000. 000	70	100.000 .000		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				1.100.0 00.000		1.250.0 00.000		1.270.0 00.000		1.280.0 00.000		1.300.0 00.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	122	1.100.000.000	102	1.250.000.000	102	1.270.000.000	102	1.280.000.000	102	1.300.000.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.652.414.449		3.001.000.000		3.096.000.000		3.169.500.000		3.317.000.000		
Terwujudnya layanan umum perkantoran perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	2.652.414.449	12	3.001.000.000	12	3.096.000.000	12	3.169.500.000	12	3.317.000.000		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	0	0				500				500			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	pada SKPD (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan (Paket)	10	8		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener	8	8		8		8		8		8			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	angan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)													
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	29	11		29		29		29		29			
	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	20	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	SKPD (Laporan)													
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0		1		1		1		1			
7.01.01.2.06.0 001 - Penyediaan Komponen				134.077 .335		150.000 .000		170.000 .000		180.000 .000		200.000 .000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Instalasi  Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8	134.077 .335	8	150.000 .000	8	170.000 .000	8	180.000 .000	8	200.000 .000		
7.01.01.2.06.0 002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				719.983 .688		660.000 .000		670.000 .000		680.000 .000		700.000 .000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka	10	8	719.983 .688	10	660.000 .000	10	670.000 .000	10	680.000 .000	10	700.000 .000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	n Kantor yang Disediakan (Paket)													
7.01.01.2.06.0 003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		11.000. 000		12.000. 000		13.000. 000		15.000. 000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	11.000. 000	1	12.000. 000	1	13.000. 000	1	15.000. 000		
7.01.01.2.06.0 004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				766.742 .984		950.000 .000		980.000 .000		1.000.0 00.000		1.050.0 00.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	29	11	766.742 .984	29	950.000 .000	29	980.000 .000	29	1.000.0 00.000	29	1.050.0 00.000		

7.01.01.2.06.0 005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				282.922 .500		360.000 .000		370.000 .000		380.000 .000		400.000 .000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	282.922 .500	3	360.000 .000	3	370.000 .000	3	380.000 .000	3	400.000 .000		
7.01.01.2.06.0 006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan				151.365 .000		220.000 .000		230.000 .000		240.000 .000		250.000 .000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perundang-undangan														
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	151.365.000	12	220.000.000	12	230.000.000	12	240.000.000	12	250.000.000		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				42.147.660		68.000.000		70.000.000		70.500.000		72.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	42.147.660	12	68.000.000	12	70.000.000	12	70.500.000	12	72.000.000		
7.01.01.2.06.0009 -				555.175.282		560.000.000		570.000.000		580.000.000		600.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	12	555.175 .282	12	560.000 .000	12	570.000 .000	12	580.000 .000	12	600.000 .000		
7.01.01.2.06.0 010 - Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD				0		11.000. .000		12.000. .000		13.000. .000		15.000. .000		
Terlaksananya Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausah aan Arsip Dinamis	0	0	0	500	11.000. .000	500	12.000. .000	500	13.000. .000	500	15.000. .000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	pada SKPD (Dokumen)													
7.01.01.2.06.0 011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0		11.000. 000		12.000. 000		13.000. 000		15.000. 000		
Terlaksananya a Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0	0	1	11.000. 000	1	12.000. 000	1	13.000. 000	1	15.000. 000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang				330.318 .975		434.000 .000		465.000 .000		492.000 .000		543.000 .000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Urusan Pemerintah Daerah														
Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	565	4	330.318 .975	10	434.000 .000	10	465.000 .000	10	492.000 .000	10	543.000 .000		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1		3		3		3		3			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	0		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1			
7.01.01.2.07.001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				105.000.000		120.000.000		127.000.000		140.000.000		153.000.000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	0	1	105.000.000	3	120.000.000	3	127.000.000	3	140.000.000	3	153.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Disediakan (Unit)													
7.01.01.2.07.0 002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		11.000. 000		12.000. 000		13.000. 000		15.000. 000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	11.000. 000	1	12.000. 000	1	13.000. 000	1	15.000. 000		
7.01.01.2.07.0 005 - Pengadaan Mebel				225.318 .975		270.000 .000		290.000 .000		300.000 .000		330.000 .000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	565	4	225.318.975	10	270.000.000	10	290.000.000	10	300.000.000	10	330.000.000		
7.01.01.2.07.006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		11.000.000		12.000.000		13.000.000		15.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	0	0	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	15.000.000		
7.01.01.2.07.010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		11.000.000		12.000.000		13.000.000		15.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	15.000.000		
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		11.000.000		12.000.000		13.000.000		15.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	0	0	0	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	15.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Bangunan Lainnya	Lainnya yang Disediakan (Unit)													
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.713.2 71.660		3.280.0 00.000		3.330.0 00.000		3.370.0 00.000		3.420.0 00.000		
Terwujudnya operasional umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.713.2 71.660	36	3.280.0 00.000	36	3.330.0 00.000	36	3.370.0 00.000	36	3.420.0 00.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12	12		24		24		24		24			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)													
7.01.01.2.08.0 002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				601.758 .100		750.000 .000		780.000 .000		800.000 .000		820.000 .000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	601.758 .100	36	750.000 .000	36	780.000 .000	36	800.000 .000	36	820.000 .000		
7.01.01.2.08.0 004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.111.5 13.560		2.530.0 00.000		2.550.0 00.000		2.570.0 00.000		2.600.0 00.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.111.5 13.560	24	2.530.0 00.000	24	2.550.0 00.000	24	2.570.0 00.000	24	2.600.0 00.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.984.1 79.800		3.804.0 00.000		3.848.0 00.000		3.912.0 00.000		3.960.0 00.000		
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar berfungsi optimal	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di	0	0	2.984.1 79.800	1	3.804.0 00.000	1	3.848.0 00.000	1	3.912.0 00.000	1	3.960.0 00.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	rehabilitasi (Unit)													
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	297	7		100		100		100		100			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	20	58		54		54		54		54			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN			
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
	Pajaknya (Unit)																
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	54	0				1				1					1	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di	7	9				8				8					8	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	rehabilitasi (Unit)													
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0	0		1		1		102		1			
7.01.01.2.09.0 001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				745.364 .000		970.000 .000		980.000 .000		1.000.0 00.000		1.000.0 00.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20	58	745.364 .000	54	970.000 .000	54	980.000 .000	54	1.000.0 00.000	54	1.000.0 00.000		
7.01.01.2.09.0 002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		11.000. 000		12.000. 000		13.000. 000		15.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	54	0	0	1	11.000. 000	1	12.000. 000	1	13.000. 000	1	15.000. 000		
7.01.01.2.09.0 005 - Pemeliharaan Mebel				0		11.000. 000		12.000. 000		13.000. 000		15.000. 000		
Terlaksanany a Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	1	11.000. 000	1	12.000. 000	1	13.000. 000	1	15.000. 000		
7.01.01.2.09.0 006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				212.343 .700		260.000 .000		270.000 .000		280.000 .000		300.000 .000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya a Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	297	7	212.343 .700	100	260.000 .000	100	270.000 .000	100	280.000 .000	100	300.000 .000		
7.01.01.2.09.0 008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		11.000. 000		12.000. 000		13.000. 000		15.000. 000		
Terlaksananya a Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	1	11.000. 000	1	12.000. 000	102	13.000. 000	1	15.000. 000		
7.01.01.2.09.0 009 - Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2.026.4 72.100		2.530.0 00.000		2.550.0 00.000		2.580.0 00.000		2.600.0 00.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya a Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit)	7	9	2.026.4 72.100	8	2.530.0 00.000	8	2.550.0 00.000	8	2.580.0 00.000	8	2.600.0 00.000		
7.01.01.2.09.0 011 - Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		11.000. 000		12.000. 000		13.000. 000		15.000. 000		
Terlaksananya a Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	0	0	0	1	11.000. 000	1	12.000. 000	1	13.000. 000	1	15.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit)													
7.01.02 - PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK				3.514.1 76.312		3.367.0 00.000		3.458.0 00.000		3.533.0 00.000		3.631.0 00.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanju ti (%)	100	100	3.514.1 76.312	100	3.367.0 00.000	100	3.458.0 00.000	100	3.533.0 00.000	100	3.631.0 00.000	7.01.0.00.0. 00.05.0000 - KECAMATA N BALIKPAPA N SELATAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggar aan Kegiatan  Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2.881.4 79.415		2.809.0 00.000		2.836.0 00.000		2.873.0 00.000		2.900.0 00.000		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggar aan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaa n dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	3	7	2.881.4 79.415	6	2.809.0 00.000	6	2.836.0 00.000	6	2.873.0 00.000	6	2.900.0 00.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.01.0 001 - Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2.881.4 79.415		2.809.0 00.000		2.836.0 00.000		2.873.0 00.000		2.900.0 00.000		
Terlaksanany a Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaa n dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan	3	7	2.881.4 79.415	6	2.809.0 00.000	6	2.836.0 00.000	6	2.873.0 00.000	6	2.900.0 00.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Instansi Vertikal Terkait	Instansi Vertikal Terkait (Laporan)													
7.01.02.2.02 - Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				0		20.000. 000		21.000. 000		22.000. 000		23.000. 000		
Terlaksananya penyelenggar aan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	2	0	0	1	20.000. 000	1	21.000. 000	1	22.000. 000	1	23.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
oleh Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang Berkualitas	Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)													
	Jumlah Dokumen Perencanaa n Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	3	0		1		1		1		1			
7.01.02.2.02.0 001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				0		10.000. 000		10.500. 000		11.000. 000		11.500. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaa n Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	3	0	0	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.000.000	1	11.500.000		
7.01.02.2.02.003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0		10.000.000		10.500.000		11.000.000		11.500.000		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	2	0	0	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.000.000	1	11.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)													
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				39.999. 625		40.000. 000		43.000. 000		45.000. 000		50.000. 000		
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanak an (Dokumen)	790	600	39.999. 625	650	40.000. 000	670	43.000. 000	700	45.000. 000	720	50.000. 000		
7.01.02.2.04.001 - Pelaksanaan				39.999. 625		40.000. 000		43.000. 000		45.000. 000		50.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanak an (Dokumen)	790	600	39.999. 625	650	40.000. 000	670	43.000. 000	700	45.000. 000	720	50.000. 000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang	100	100	3.514.1 76.312	100	3.367.0 00.000	100	3.458.0 00.000	100	3.533.0 00.000	100	3.631.0 00.000	7.01.0.00.0. 00.05.0001 - KELURAHA N DAMAI BAHAGIA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	ditindaklanju ti (%)													
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggar aan KegiatanPem erintahan di Tingkat Kecamatan				86.461. 000		70.000. 000		80.000. 000		85.000. 000		95.000. 000		
Terlaksanany a Koordinasi Penyelenggar aan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaa n dan Pelaksanaa n Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi	0	2	86.461. 000	6	70.000. 000	6	80.000. 000	6	85.000. 000	6	95.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Vertikal Terkait (Laporan)													
7.01.02.2.01.0 001 - Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				86.461. 000		70.000. 000		80.000. 000		85.000. 000		95.000. 000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	2	86.461.000	6	70.000.000	6	80.000.000	6	85.000.000	6	95.000.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang	100	100	3.514.176.312	100	3.367.000.000	100	3.458.000.000	100	3.533.000.000	100	3.631.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0002 - KELURAHAN SEPINGGA RAYA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	ditindaklanju ti (%)													
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggar aan Kegiatan  Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				115.000 .000		70.000. 000		80.000. 000		85.000. 000		95.000. 000		
Terlaksanany a Koordinasi Penyelenggar aan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaa n dan Pelaksanaa n Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi	0	2	115.000 .000	6	70.000. 000	6	80.000. 000	6	85.000. 000	6	95.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Vertikal Terkait (Laporan)													
7.01.02.2.01.0 001 - Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				115.000 .000		70.000. 000		80.000. 000		85.000. 000		95.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	2	115.000.000	6	70.000.000	6	80.000.000	6	85.000.000	6	95.000.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang	100	100	3.514.176.312	100	3.367.000.000	100	3.458.000.000	100	3.533.000.000	100	3.631.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0003 - KELURAHAN DAMAI BARU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	ditindaklanju ti (%)													
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggar aan Kegiatan  Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				77.999. 550		68.000. 000		78.000. 000		83.000. 000		93.000. 000		
Terlaksanany a Koordinasi Penyelenggar aan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaa n dan Pelaksanaa n Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi	0	2	77.999. 550	6	68.000. 000	6	78.000. 000	6	83.000. 000	6	93.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Vertikal Terkait (Laporan)													
7.01.02.2.01.0 001 - Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				77.999. 550		68.000. 000		78.000. 000		83.000. 000		93.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	2	77.999.550	6	68.000.000	6	78.000.000	6	83.000.000	6	93.000.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang	100	100	3.514.176.312	100	3.367.000.000	100	3.458.000.000	100	3.533.000.000	100	3.631.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0004 - KELURAHAN SEPINGGAN BARU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	ditindaklanju ti (%)													
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggar aan Kegiatan  Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				76.450. 000		70.000. 000		78.000. 000		83.000. 000		93.000. 000		
Terlaksanany a Koordinasi Penyelenggar aan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaa n dan Pelaksanaa n Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi	0	2	76.450. 000	6	70.000. 000	6	78.000. 000	6	83.000. 000	6	93.000. 000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Vertikal Terkait (Laporan)													
7.01.02.2.01.0 001 - Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				76.450. 000		70.000. 000		78.000. 000		83.000. 000		93.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	2	76.450.000	6	70.000.000	6	78.000.000	6	83.000.000	6	93.000.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang	100	100	3.514.176.312	100	3.367.000.000	100	3.458.000.000	100	3.533.000.000	100	3.631.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0005 - KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	ditindaklanju ti (%)													
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggar aan Kegiatan  Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				77.029. 200		70.000. 000		80.000. 000		85.000. 000		95.000. 000		
Terlaksanany a Koordinasi Penyelenggar aan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaa n dan Pelaksanaa n Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi	0	2	77.029. 200	6	70.000. 000	6	80.000. 000	6	85.000. 000	6	95.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Vertikal Terkait (Laporan)													
7.01.02.2.01.0 001 - Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				77.029. 200		70.000. 000		80.000. 000		85.000. 000		95.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	2	77.029.200	6	70.000.000	6	80.000.000	6	85.000.000	6	95.000.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang	100	100	3.514.176.312	100	3.367.000.000	100	3.458.000.000	100	3.533.000.000	100	3.631.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0006 - KELURAHAN SEPINGGAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	ditindaklanju ti (%)													
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggar aan Kegiatan  Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				76.997. 522		80.000. 000		82.000. 000		87.000. 000		92.000. 000		
Terselenggar anya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaa n dan Pelaksanaa n Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi	0	2	76.997. 522	6	80.000. 000	6	82.000. 000	6	87.000. 000	6	92.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Vertikal Terkait (Laporan)													
7.01.02.2.01.0 001 - Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				76.997. 522		80.000. 000		82.000. 000		87.000. 000		92.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	2	76.997.522	6	80.000.000	6	82.000.000	6	87.000.000	6	92.000.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang	100	100	3.514.176.312	100	3.367.000.000	100	3.458.000.000	100	3.533.000.000	100	3.631.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0007 - KELURAHAN SUNGAI NANGKA	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	ditindaklanju ti (%)													
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggar aan Kegiatan  Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				82.760. 000		70.000. 000		80.000. 000		85.000. 000		95.000. 000		
terlaksananya koordinasi penyelenggar aan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaa n dan Pelaksanaa n Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi	0	2	82.760. 000	6	70.000. 000	6	80.000. 000	6	85.000. 000	6	95.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Vertikal Terkait (Laporan)													
7.01.02.2.01.0 001 - Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				82.760. 000		70.000. 000		80.000. 000		85.000. 000		95.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	2	82.760.000	6	70.000.000	6	80.000.000	6	85.000.000	6	95.000.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				20.821.367.901		17.648.000.000		18.766.000.000		19.264.000.000		19.989.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembanguna n di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangun an sarana dan prasarana serta pemberdaya an masyarakat di wilayah kecamatan (%)	20,28	25	20.821. 367.901	27,5	17.648. 000.000	30	18.766. 000.000	32,5	19.264. 000.000	33	19.989. 000.000	7.01.0.00.0. 00.05.0000 - KECAMATA N BALIKPAPA N SELATAN	
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarak atan di Kecamatan (%)	100	100				100				100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan				342.194 .584		255.000 .000		290.000 .000		310.000 .000		340.000 .000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemberdayaa n Kelurahan														
Terselenggar anya kegiatan pemberdayaa n masyarakat di kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	2	2	342.194 .584	3	255.000 .000	3	290.000 .000	3	310.000 .000	3	340.000 .000		
	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipa si dalam Forum Musyawarah Perencanaa n Pembangun an di Kelurahan (Lembaga Kemasyarak atan)	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02.0 001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Kelurahan				87.194. 518		80.000. 000		90.000. 000		100.000 .000		110.000 .000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipa si dalam Forum Musyawarah Perencanaa n Pembangun an di Kelurahan (Lembaga Kemasyarak atan)	100	100	87.194. 518	100	80.000. 000	100	90.000. 000	100	100.000 .000	100	110.000 .000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02.0 004 - Evaluasi Kelurahan				255.000 .066		175.000 .000		200.000 .000		210.000 .000		230.000 .000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	2	2	255.000 .066	3	175.000 .000	3	200.000 .000	3	210.000 .000	3	230.000 .000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.249.3 94.585		1.501.0 00.000		1.542.0 00.000		1.585.0 00.000		1.685.0 00.000		
Tercapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	100	11	1.249.3 94.585	3	1.501.0 00.000	3	1.542.0 00.000	3	1.585.0 00.000	3	1.685.0 00.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengemban gan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaata n Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Ditingkatkan Kapasitasny a (Lembaga Kemasyarak atan)	0	100		337		337		337		337			
	Jumlah Sarana dan Prasarana	0	0		1		1		1		1			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Lembaga Kemasyarak atan yang Disediakan (Unit)													
7.01.03.2.03.0 001 - Penyelenggar aan Lembaga Kemasyarakatan				511.999 .765		660.000 .000		670.000 .000		682.000 .000		700.000 .000		
Terselenggar anya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Diselenggar akan (Lembaga Kemasyarak atan)	100	11	511.999 .765	3	660.000 .000	3	670.000 .000	3	682.000 .000	3	700.000 .000		
7.01.03.2.03.0 002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				30.000. 000		40.000. 000		50.000. 000		60.000. 000		70.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakat an	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Ditingkatkan Kapasitasny a (Lembaga Kemasyarak atan)	0	100	30.000. 000	337	40.000. 000	337	50.000. 000	337	60.000. 000	337	70.000. 000		
7.01.03.2.03.0 003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakat an				0		11.000. 000		12.000. 000		13.000. 000		15.000. 000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakat an	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarak atan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	11.000. 000	1	12.000. 000	1	13.000. 000	1	15.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.03.004 - Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat				549.998 .885		510.000 .000		520.000 .000		530.000 .000		550.000 .000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1	549.998 .885	1	510.000 .000	1	520.000 .000	1	530.000 .000	1	550.000 .000		
7.01.03.2.03.005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				157.395 .935		280.000 .000		290.000 .000		300.000 .000		350.000 .000		
Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi	1	1	157.395 .935	1	280.000 .000	1	290.000 .000	1	300.000 .000	1	350.000 .000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tepat Guna (Laporan)													
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembanguna n di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangun an sarana dan prasarana serta pemberdaya an masyarakat di wilayah kecamatan (%)	20,28	25	20.821. 367.901	27,5	17.648. 000.000	30	18.766. 000.000	32,5	19.264. 000.000	33	19.989. 000.000	7.01.0.00.0. 00.05.0001 - KELURAHAN DAMAI BAHAGIA	
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarak atan di	0	100				100				100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kecamatan (%)													
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaa n Kelurahan				938.399 .450		1.045.0 00.000		1.127.0 00.000		1.162.0 00.000		1.207.0 00.000		
Terselenggar anya kegiatan pemberdayaa n masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1	938.399 .450	1	1.045.0 00.000	1	1.127.0 00.000	1	1.162.0 00.000	1	1.207.0 00.000		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	2		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipa si dalam Forum Musyawarah Perencanaa n Pembangun an di Kelurahan (Lembaga Kemasyarak atan)	43	46		44		44		44		44			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	91	50		10		10		10		10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02.0 001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Kelurahan				36.620. 000		50.000. 000		60.000. 000		70.000. 000		70.000. 000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipa si dalam Forum Musyawarah Perencanaa n Pembangun an di Kelurahan (Lembaga Kemasyarak atan)	43	46	36.620. 000	44	50.000. 000	44	60.000. 000	44	70.000. 000	44	70.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02.0 002 - Pembanguna n Sarana dan Prasarana Kelurahan				834.779 .450		850.000 .000		870.000 .000		880.000 .000		900.000 .000		
Terbangunnya a Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	91	50	834.779 .450	10	850.000 .000	10	870.000 .000	10	880.000 .000	10	900.000 .000		
7.01.03.2.02.0 003 - Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan				50.000. 000		125.000 .000		175.000 .000		187.000 .000		210.000 .000		
Terlaksananya a Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan	1	1	50.000. 000	1	125.000 .000	1	175.000 .000	1	187.000 .000	1	210.000 .000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Pokmas / Ormas)													
7.01.03.2.02.0 004 - Evaluasi Kelurahan				17.000. 000		20.000. 000		22.000. 000		25.000. 000		27.000. 000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	2	17.000. 000	1	20.000. 000	1	22.000. 000	1	25.000. 000	1	27.000. 000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				898.539 .000		1.100.0 00.000		1.220.0 00.000		1.240.0 00.000		1.300.0 00.000		
Tercapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga	43	43	898.539 .000	43	1.100.0 00.000	43	1.220.0 00.000	43	1.240.0 00.000	43	1.300.0 00.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kemasyarak atan)													
7.01.03.2.03.0 001 - Penyelenggar aan Lembaga Kemasyarakat an				898.539 .000		1.100.0 00.000		1.220.0 00.000		1.240.0 00.000		1.300.0 00.000		
Terselenggar anya Lembaga Kemasyarakat an	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Diselenggar akan (Lembaga Kemasyarak atan)	43	43	898.539 .000	43	1.100.0 00.000	43	1.220.0 00.000	43	1.240.0 00.000	43	1.300.0 00.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembanguna n di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada	20,28	25	20.821. 367.901	27,5	17.648. 000.000	30	18.766. 000.000	32,5	19.264. 000.000	33	19.989. 000.000	7.01.0.00.0. 00.05.0002 - KELURAHA N SEPINGGA N RAYA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	pembangun an sarana dan prasarana serta pemberdaya an masyarakat di wilayah kecamatan (%)													
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarak atan di Kecamatan (%)	0	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaa n Kelurahan				1.142.7 85.000		1.045.0 00.000		1.127.0 00.000		1.162.0 00.000		1.207.0 00.000		
Terselenggar anya kegiatan pemberdayaa n masyarakat di kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	80	44	1.142.7 85.000	10	1.045.0 00.000	10	1.127.0 00.000	10	1.162.0 00.000	10	1.207.0 00.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terbangun (Unit)													
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipa si dalam Forum Musyawarah Perencanaa n Pembangun an di Kelurahan	39	39		37		37		37		37			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Lembaga Kemasyarak atan)													
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1				1				1			
7.01.03.2.02.0 001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Kelurahan				31.245. 000		50.000. 000		60.000. 000		70.000. 000		70.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipa si dalam Forum Musyawarah Perencanaa n Pembangun an di Kelurahan (Lembaga Kemasyarak atan)	39	39	31.245.000	37	50.000.000	37	60.000.000	37	70.000.000	37	70.000.000		
7.01.03.2.02.002 - Pembanguna n Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.044.540.000		850.000.000		870.000.000		880.000.000		900.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	80	44	1.044.540.000	10	850.000.000	10	870.000.000	10	880.000.000	10	900.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terbangun (Unit)													
7.01.03.2.02.0 003 - Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan				50.000. 000		125.000 .000		175.000 .000		187.000 .000		210.000 .000		
Terlaksananya Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1	50.000. 000	1	125.000 .000	1	175.000 .000	1	187.000 .000	1	210.000 .000		
7.01.03.2.02.0 004 - Evaluasi Kelurahan				17.000. 000		20.000. 000		22.000. 000		25.000. 000		27.000. 000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	0	1	17.000. 000	1	20.000. 000	1	22.000. 000	1	25.000. 000	1	27.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kelurahan (Laporan)													
7.01.03.2.03 - Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarak atan Tingkat Kecamatan				750.000 .000		900.000 .000		970.000 .000		1.000.0 00.000		1.100.0 00.000		
Tercapai keaktifan lembaga kemasyarak atan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Diselenggar akan (Lembaga Kemasyarak atan)	36	36	750.000 .000	36	900.000 .000	36	970.000 .000	36	1.000.0 00.000	36	1.100.0 00.000		
7.01.03.2.03.0 001 - Penyelenggar aan Lembaga Kemasyarak atan				750.000 .000		900.000 .000		970.000 .000		1.000.0 00.000		1.100.0 00.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggar anya Lembaga Kemasyarak an	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Diselenggar akan (Lembaga Kemasyarak atan)	36	36	750.000 .000	36	900.000 .000	36	970.000 .000	36	1.000.0 00.000	36	1.100.0 00.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembanguna n di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangun an sarana dan prasarana serta pemberdaya an masyarakat di wilayah kecamatan (%)	20,28	25	20.821. 367.901	27,5	17.648. 000.000	30	18.766. 000.000	32,5	19.264. 000.000	33	19.989. 000.000	7.01.0.00.0. 00.05.0003 - KELURAHAN DAMAI BARU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	0	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaa n Kelurahan				682.785.924		1.042.000.000		1.122.000.000		1.157.000.000		1.192.000.000		
Terselenggaranya kegiatan pemberdaya an masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1	682.785.924	1	1.042.000.000	1	1.122.000.000	1	1.157.000.000	1	1.192.000.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	119	40				10				10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terbangun (Unit)													
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	27	27		25		25		25		25			
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02.0 001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Kelurahan				21.569. 875		50.000. 000		60.000. 000		70.000. 000		60.000. 000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipa si dalam Forum Musyawarah Perencanaa n Pembangun an di Kelurahan (Lembaga Kemasyarak atan)	27	27	21.569. 875	25	50.000. 000	25	60.000. 000	25	70.000. 000	25	60.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02.0002 - Pembanguna n Sarana dan Prasarana Kelurahan				601.240 .360		850.000 .000		870.000 .000		880.000 .000		900.000 .000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	119	40	601.240 .360	10	850.000 .000	10	870.000 .000	10	880.000 .000	10	900.000 .000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan				49.975. 999		125.000 .000		175.000 .000		187.000 .000		210.000 .000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	1	49.975. 999	1	125.000 .000	1	175.000 .000	1	187.000 .000	1	210.000 .000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Pokmas / Ormas)													
7.01.03.2.02.0 004 - Evaluasi Kelurahan				9.999.6 90		17.000. 000		17.000. 000		20.000. 000		22.000. 000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	2	9.999.6 90	2	17.000. 000	2	17.000. 000	2	20.000. 000	2	22.000. 000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				555.000 .065		680.000 .000		730.000 .000		750.000 .000		800.000 .000		
Tercapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga	24	24	555.000 .065	24	680.000 .000	24	730.000 .000	24	750.000 .000	24	800.000 .000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kemasyarak atan)													
7.01.03.2.03.0 001 - Penyelenggar aan Lembaga Kemasyarakat an				555.000 .065		680.000 .000		730.000 .000		750.000 .000		800.000 .000		
Terselenggar anya Lembaga Kemasyarakat an	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Diselenggar akan (Lembaga Kemasyarak atan)	24	24	555.000 .065	24	680.000 .000	24	730.000 .000	24	750.000 .000	24	800.000 .000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembanguna n di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada	20,28	25	20.821. 367.901	27,5	17.648. 000.000	30	18.766. 000.000	32,5	19.264. 000.000	33	19.989. 000.000	7.01.0.00.0. 00.05.0004 - KELURAHA N SEPINGGA N BARU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	pembangun an sarana dan prasarana serta pemberdaya an masyarakat di wilayah kecamatan (%)													
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarak atan di Kecamatan (%)	0	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaa n Kelurahan				3.122.0 29.670		1.045.0 00.000		1.127.0 00.000		1.162.0 00.000		1.207.0 00.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggar anya kegiatan pemberdayaa n masyarakat di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipa si dalam Forum Musyawarah Perencanaa n Pembangun an di Kelurahan (Lembaga Kemasyarak atan)	70	70	3.122.0 29.670	68	1.045.0 00.000	68	1.127.0 00.000	68	1.162.0 00.000	68	1.207.0 00.000		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	22		2		2		2		2			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)													
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	39	166		10		10		10		10			
7.01.03.2.02.0 001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Kelurahan				45.489. 670		50.000. 000		60.000. 000		70.000. 000		70.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipa si dalam Forum Musyawarah Perencanaa n Pembangun an di Kelurahan (Lembaga Kemasyarak atan)	70	70	45.489.670	68	50.000.000	68	60.000.000	68	70.000.000	68	70.000.000		
7.01.03.2.02.002 - Pembanguna n Sarana dan Prasarana Kelurahan				2.409.540.000		850.000.000		870.000.000		880.000.000		900.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	39	166	2.409.540.000	10	850.000.000	10	870.000.000	10	880.000.000	10	900.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terbangun (Unit)													
7.01.03.2.02.0 003 - Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan				650.000 .000		125.000 .000		175.000 .000		187.000 .000		210.000 .000		
Terlaksananya Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1	650.000 .000	1	125.000 .000	1	175.000 .000	1	187.000 .000	1	210.000 .000		
7.01.03.2.02.0 004 - Evaluasi Kelurahan				17.000. 000		20.000. 000		22.000. 000		25.000. 000		27.000. 000		
Terlaksananya a Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	0	22	17.000. 000	2	20.000. 000	2	22.000. 000	2	25.000. 000	2	27.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kelurahan (Laporan)													
7.01.03.2.03 - Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarak an Tingkat Kecamatan				1.334.5 40.000		1.700.0 00.000		1.770.0 00.000		1.800.0 00.000		1.820.0 00.000		
Tercapai keaktifan lembaga kemasyarak an di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Diselenggar akan (Lembaga Kemasyarak atan)	67	67	1.334.5 40.000	67	1.700.0 00.000	67	1.770.0 00.000	67	1.800.0 00.000	67	1.820.0 00.000		
7.01.03.2.03.0 001 - Penyelenggar aan Lembaga Kemasyarak an				1.334.5 40.000		1.700.0 00.000		1.770.0 00.000		1.800.0 00.000		1.820.0 00.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggar anya Lembaga Kemasyarak an	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Diselenggar akan (Lembaga Kemasyarak atan)	67	67	1.334.5 40.000	67	1.700.0 00.000	67	1.770.0 00.000	67	1.800.0 00.000	67	1.820.0 00.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembanguna n di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangun an sarana dan prasarana serta pemberdaya an masyarakat di wilayah kecamatan (%)	20,28	25	20.821. 367.901	27,5	17.648. 000.000	30	18.766. 000.000	32,5	19.264. 000.000	33	19.989. 000.000	7.01.0.00.0. 00.05.0005 - KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	0	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaa n Kelurahan				940.171 .400		1.045.0 00.000		1.127.0 00.000		1.162.0 00.000		1.207.0 00.000		
Terselenggar anya kegiatan pemberdayaa n masyarakat di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipa si dalam Forum Musyawarah Perencanaa n Pembangun an di Kelurahan (Lembaga Kemasyarak atan)	64	64	940.171 .400	62	1.045.0 00.000	62	1.127.0 00.000	62	1.162.0 00.000	62	1.207.0 00.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	2		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	158	39		10		10		10		10			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02.0 001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Kelurahan				38.149. 590		50.000. 000		60.000. 000		70.000. 000		70.000. 000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipa si dalam Forum Musyawarah Perencanaa n Pembangun an di Kelurahan (Lembaga Kemasyarak atan)	64	64	38.149. 590	62	50.000. 000	62	60.000. 000	62	70.000. 000	62	70.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02.0 002 - Pembanguna n Sarana dan Prasarana Kelurahan				835.021 .810		850.000 .000		870.000 .000		880.000 .000		900.000 .000		
Terbangunnya a Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	158	39	835.021 .810	10	850.000 .000	10	870.000 .000	10	880.000 .000	10	900.000 .000		
7.01.03.2.02.0 003 - Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan				50.000. 000		125.000 .000		175.000 .000		187.000 .000		210.000 .000		
Terlaksananya a Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan	1	1	50.000. 000	1	125.000 .000	1	175.000 .000	1	187.000 .000	1	210.000 .000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Pokmas / Ormas)													
7.01.03.2.02.0 004 - Evaluasi Kelurahan				17.000. 000		20.000. 000		22.000. 000		25.000. 000		27.000. 000		
Terlaksananya a Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	2	17.000. 000	1	20.000. 000	1	22.000. 000	1	25.000. 000	1	27.000. 000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarak an Tingkat Kecamatan				1.237.9 24.390		1.450.0 00.000		1.470.0 00.000		1.500.0 00.000		1.520.0 00.000		
Tercapai keaktifan lembaga kemasyarak an di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Diselenggar akan (Lembaga	61	61	1.237.9 24.390	61	1.450.0 00.000	61	1.470.0 00.000	61	1.500.0 00.000	61	1.520.0 00.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kemasyarak atan)													
7.01.03.2.03.0 001 - Penyelenggar aan Lembaga Kemasyarakat an				1.237.9 24.390		1.450.0 00.000		1.470.0 00.000		1.500.0 00.000		1.520.0 00.000		
Terselenggar anya Lembaga Kemasyarakat an	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Diselenggar akan (Lembaga Kemasyarak atan)	61	61	1.237.9 24.390	61	1.450.0 00.000	61	1.470.0 00.000	61	1.500.0 00.000	61	1.520.0 00.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembanguna n di Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarak atan di Kecamatan (%)	0	100	20.821. 367.901	100	17.648. 000.000	100	18.766. 000.000	100	19.264. 000.000	100	19.989. 000.000	7.01.0.00.0. 00.05.0006 - KELURAHA N SEPINGGA N	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	20,28	25		27,5		30		32,5		33			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaa n Kelurahan				3.876.701.388		1.045.000.000		1.127.000.000		1.162.000.000		1.207.000.000		
Terselenggar any a kegiatan pemberdayaa n masyarakat di kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	0	2	3.876.701.388	1	1.045.000.000	1	1.127.000.000	1	1.162.000.000	1	1.207.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kelurahan (Laporan)													
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	10	445		10		10		10		10			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipa si dalam Forum	75	75		73		73		73		73			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Musyawarah Perencanaa n Pembangun an di Kelurahan (Lembaga Kemasyarak atan)													
7.01.03.2.02.0 001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Kelurahan				48.163. 030		50.000. 000		60.000. 000		70.000. 000		70.000. 000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipa si dalam Forum	75	75	48.163. 030	73	50.000. 000	73	60.000. 000	73	70.000. 000	73	70.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
n di Kelurahan	Musyawarah Perencanaa n Pembangun an di Kelurahan (Lembaga Kemasyarak atan)													
7.01.03.2.02.0 002 - Pembanguna n Sarana dan Prasarana Kelurahan				3.761.5 38.358		850.000 .000		870.000 .000		880.000 .000		900.000 .000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	10	445	3.761.5 38.358	10	850.000 .000	10	870.000 .000	10	880.000 .000	10	900.000 .000		
7.01.03.2.02.0 003 - Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan				50.000. 000		125.000 .000		175.000 .000		187.000 .000		210.000 .000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1	50.000. 000	1	125.000 .000	1	175.000 .000	1	187.000 .000	1	210.000 .000		
7.01.03.2.02.0 004 - Evaluasi Kelurahan				17.000. 000		20.000. 000		22.000. 000		25.000. 000		27.000. 000		
Terlaksananya a Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	2	17.000. 000	1	20.000. 000	1	22.000. 000	1	25.000. 000	1	27.000. 000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakat an Tingkat Kecamatan				1.429.2 22.445		1.650.0 00.000		1.720.0 00.000		1.750.0 00.000		1.770.0 00.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tercapai keaktifan lembaga kemasyarak an di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Diselenggar akan (Lembaga Kemasyarak atan)	72	72	1.429.2 22.445	72	1.650.0 00.000	72	1.720.0 00.000	72	1.750.0 00.000	72	1.770.0 00.000		
7.01.03.2.03.0 001 - Penyelenggar aan Lembaga Kemasyarak an				1.429.2 22.445		1.650.0 00.000		1.720.0 00.000		1.750.0 00.000		1.770.0 00.000		
Terselenggar anya Lembaga Kemasyarak an	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Diselenggar akan (Lembaga Kemasyarak atan)	72	72	1.429.2 22.445	72	1.650.0 00.000	72	1.720.0 00.000	72	1.750.0 00.000	72	1.770.0 00.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	20,28	25	20.821.367.901	27,5	17.648.000.000	30	18.766.000.000	32,5	19.264.000.000	33	19.989.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0007 - KELURAHAN SUNGAI NANGKA	
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	0	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan				1.340.124.000		1.045.000.000		1.127.000.000		1.162.000.000		1.207.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemberdayaa n Kelurahan														
Terselenggar anya kegiatan pemberdayaa n masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1	1.340.1 24.000	1	1.045.0 00.000	1	1.127.0 00.000	1	1.162.0 00.000	1	1.207.0 00.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	76	85		10		10		10		10			
	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipa si dalam Forum	51	51		49		49		49		49			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Musyawarah Perencanaa n Pembangun an di Kelurahan (Lembaga Kemasyarak atan)													
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	2				1				1			
7.01.03.2.02.0 001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Kelurahan				35.570. 000		50.000. 000		60.000. 000		70.000. 000		70.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipa si dalam Forum Musyawarah Perencanaa n Pembangun an di Kelurahan (Lembaga Kemasyarak atan)	51	51	35.570. 000	49	50.000. 000	49	60.000. 000	49	70.000. 000	49	70.000. 000		
7.01.03.2.02.0 002 - Pembanguna n Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.237.5 54.000		850.000 .000		870.000 .000		880.000 .000		900.000 .000		
Terbangunnya a Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	76	85	1.237.5 54.000	10	850.000 .000	10	870.000 .000	10	880.000 .000	10	900.000 .000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terbangun (Unit)													
7.01.03.2.02.0 003 - Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan				50.000. 000		125.000 .000		175.000 .000		187.000 .000		210.000 .000		
Terlaksananya a Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1	50.000. 000	1	125.000 .000	1	175.000 .000	1	187.000 .000	1	210.000 .000		
7.01.03.2.02.0 004 - Evaluasi Kelurahan				17.000. 000		20.000. 000		22.000. 000		25.000. 000		27.000. 000		
Terlaksananya a Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	0	2	17.000. 000	1	20.000. 000	1	22.000. 000	1	25.000. 000	1	27.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kelurahan (Laporan)													
7.01.03.2.03 - Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarak atan Tingkat Kecamatan				981.556 .000		1.100.0 00.000		1.170.0 00.000		1.200.0 00.000		1.220.0 00.000		
Tercapai keaktifan lembaga kemasyarak atan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Diselenggar akan (Lembaga Kemasyarak atan)	48	48	981.556 .000	48	1.100.0 00.000	48	1.170.0 00.000	48	1.200.0 00.000	48	1.220.0 00.000		
7.01.03.2.03.0 001 - Penyelenggar aan Lembaga Kemasyarak atan				981.556 .000		1.100.0 00.000		1.170.0 00.000		1.200.0 00.000		1.220.0 00.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggar anya Lembaga Kemasyarak an	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Diselenggar akan (Lembaga Kemasyarak atan)	48	48	981.556 .000	48	1.100.0 00.000	48	1.170.0 00.000	48	1.200.0 00.000	48	1.220.0 00.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM				1.014.9 04.308		1.337.5 00.000		1.452.5 00.000		1.596.5 00.000		1.749.0 00.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanju ti (%)	100	100	1.014.9 04.308	100	1.337.5 00.000	100	1.452.5 00.000	100	1.596.5 00.000	100	1.749.0 00.000	7.01.0.00.0. 00.05.0000 - KECAMATA N BALIKPAPA N SELATAN	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya				101.404 .163		170.000 .000		180.000 .000		200.000 .000		220.000 .000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyelenggar aan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
Terselenggar anya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	19	15	101.404 .163	14	170.000 .000	14	180.000 .000	14	200.000 .000	14	220.000 .000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04.2.01.0 001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				101.404 .163		170.000 .000		180.000 .000		200.000 .000		220.000 .000		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	19	15	101.404 .163	14	170.000 .000	14	180.000 .000	14	200.000 .000	14	220.000 .000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Wilayah Kecamatan	dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)													
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				170.581 .340		190.000 .000		200.000 .000		210.000 .000		230.000 .000		
Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	0	5	170.581 .340	15	190.000 .000	15	200.000 .000	15	210.000 .000	15	230.000 .000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)													
7.01.04.2.02.0 001 - Koordinasi/Si nergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara				170.581 .340		190.000 .000		200.000 .000		210.000 .000		230.000 .000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Republik Indonesia														
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	5	170.581 .340	15	190.000 .000	15	200.000 .000	15	210.000 .000	15	230.000 .000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanju ti (%)	100	100	1.014.9 04.308	100	1.337.5 00.000	100	1.452.5 00.000	100	1.596.5 00.000	100	1.749.0 00.000	7.01.0.00.0. 00.05.0001 - KELURAHA N DAMAI BAHAGIA	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				47.500. 000		80.000. 000		90.000. 000		100.000 .000		110.000 .000		
Terselenggar anya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	4	4	47.500. 000	14	80.000. 000	14	90.000. 000	14	100.000 .000	14	110.000 .000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)													
7.01.04.2.01.0 001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				47.500. 000		80.000. 000		90.000. 000		100.000 .000		110.000 .000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	47.500.000	14	80.000.000	14	90.000.000	14	100.000.000	14	110.000.000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				62.000.000		62.500.000		63.000.000		70.000.000		76.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	4	62.000.000	14	62.500.000	14	63.000.000	14	70.000.000	14	76.000.000		
7.01.04.2.02.001 - Koordinasi/S inergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan				62.000.000		62.500.000		63.000.000		70.000.000		76.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	0	4	62.000.000	14	62.500.000	14	63.000.000	14	70.000.000	14	76.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Republik Indonesia	Negara Republik Indonesia (Laporan)													
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanju ti (%)	100	100	1.014.9 04.308	100	1.337.5 00.000	100	1.452.5 00.000	100	1.596.5 00.000	100	1.749.0 00.000	7.01.0.00.0. 00.05.0002 - KELURAHA N SEPINGGA N RAYA	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				34.000. 000		60.000. 000		70.000. 000		80.000. 000		90.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggar anya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	4	34.000. 000	14	60.000. 000	14	70.000. 000	14	80.000. 000	14	90.000. 000		
7.01.04.2.01.0 001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional				34.000. 000		60.000. 000		70.000. 000		80.000. 000		90.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	4	34.000. 000	14	60.000. 000	14	70.000. 000	14	80.000. 000	14	90.000. 000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan				67.000. 000		60.000. 000		63.000. 000		70.000. 000		76.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	4	67.000. 000	14	60.000. 000	14	63.000. 000	14	70.000. 000	14	76.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				67.000.000		60.000.000		63.000.000		70.000.000		76.000.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di	0	4	67.000.000	14	60.000.000	14	63.000.000	14	70.000.000	14	76.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)													
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanju ti (%)	100	100	1.014.9 04.308	100	1.337.5 00.000	100	1.452.5 00.000	100	1.596.5 00.000	100	1.749.0 00.000	7.01.0.00.0. 00.05.0003 - KELURAHA N DAMAI BARU	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketenteraman dan				34.999. 000		60.000. 000		70.000. 000		80.000. 000		90.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ketertiban Umum														
Terselenggar anya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	4	34.999. 000	14	60.000. 000	14	70.000. 000	14	80.000. 000	14	90.000. 000		
7.01.04.2.01.0 001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik				34.999. 000		60.000. 000		70.000. 000		80.000. 000		90.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	4	34.999.000	14	60.000.000	14	70.000.000	14	80.000.000	14	90.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				65.000. 330		55.000. 000		60.000. 000		68.000. 000		74.000. 000		
Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara	0	4	65.000. 330	14	55.000. 000	14	60.000. 000	14	68.000. 000	14	74.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Republik Indonesia (Laporan)													
7.01.04.2.02.0 001 - Koordinasi/Si nergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				65.000. 330		55.000. 000		60.000. 000		68.000. 000		74.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	4	65.000.330	14	55.000.000	14	60.000.000	14	68.000.000	14	74.000.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang	100	100	1.014.904.308	100	1.337.500.000	100	1.452.500.000	100	1.596.500.000	100	1.749.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0004 - KELURAHAN SEPINGGAN BARU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Umum di Kecamatan	ditindaklanju ti (%)													
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				42.500.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000		110.000.000		
Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	0	4	42.500.000	14	80.000.000	14	90.000.000	14	100.000.000	14	110.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kecamatan (Laporan)													
7.01.04.2.01.0 001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				42.500. 000		80.000. 000		90.000. 000		100.000 .000		110.000 .000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	4	42.500.000	14	80.000.000	14	90.000.000	14	100.000.000	14	110.000.000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				67.000.000		60.000.000		63.000.000		70.000.000		76.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	4	67.000.000	14	60.000.000	14	63.000.000	14	70.000.000	14	76.000.000		
7.01.04.2.02.001 - Koordinasi/S inergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan				67.000.000		60.000.000		63.000.000		70.000.000		76.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	0	4	67.000.000	14	60.000.000	14	63.000.000	14	70.000.000	14	76.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Republik Indonesia	Negara Republik Indonesia (Laporan)													
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanju ti (%)	100	100	1.014.9 04.308	100	1.337.5 00.000	100	1.452.5 00.000	100	1.596.5 00.000	100	1.749.0 00.000	7.01.0.00.0. 00.05.0005 - KELURAHA N GUNUNG BAHAGIA	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				39.294. 700		55.000. 000		60.500. 000		66.500. 000		73.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggar anya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	4	39.294. 700	14	55.000. 000	14	60.500. 000	14	66.500. 000	14	73.000. 000		
7.01.04.2.01.0 001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional				39.294. 700		55.000. 000		60.500. 000		66.500. 000		73.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	4	39.294.700	14	55.000.000	14	60.500.000	14	66.500.000	14	73.000.000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan				62.624.775		100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	4	62.624.775	14	100.000.000	14	110.000.000	14	120.000.000	14	130.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				62.624.775		100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di	0	4	62.624.775	14	100.000.000	14	110.000.000	14	120.000.000	14	130.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)													
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanju ti (%)	100	100	1.014.9 04.308	100	1.337.5 00.000	100	1.452.5 00.000	100	1.596.5 00.000	100	1.749.0 00.000	7.01.0.00.0. 00.05.0006 - KELURAHA N SEPINGGA N	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketenteraman dan				42.500. 000		80.000. 000		90.000. 000		100.000 .000		110.000 .000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ketertiban Umum														
Terselenggar anya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	4	42.500. 000	6	80.000. 000	6	90.000. 000	6	100.000 .000	6	110.000 .000		
7.01.04.2.01.0 001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik				42.500. 000		80.000. 000		90.000. 000		100.000 .000		110.000 .000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	4	42.500.000	6	80.000.000	6	90.000.000	6	100.000.000	6	110.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				69.000. 000		65.000. 000		70.000. 000		72.000. 000		78.000. 000		
Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara	0	4	69.000. 000	14	65.000. 000	14	70.000. 000	14	72.000. 000	14	78.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Republik Indonesia (Laporan)													
7.01.04.2.02.0 001 - Koordinasi/Si nergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				69.000. 000		65.000. 000		70.000. 000		72.000. 000		78.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	4	69.000.000	14	65.000.000	14	70.000.000	14	72.000.000	14	78.000.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang	0	100	1.014.904.308	100	1.337.500.000	100	1.452.500.000	100	1.596.500.000	100	1.749.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0007 - KELURAHAN SUNGAI NANGKA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Umum di Kecamatan	ditindaklanju ti (%)													
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				42.500.000		100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		
Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	0	4	42.500.000	14	100.000.000	14	110.000.000	14	120.000.000	14	130.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kecamatan (Laporan)													
7.01.04.2.01.0 001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				42.500. 000		100.000 .000		110.000 .000		120.000 .000		130.000 .000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	4	42.500.000	14	100.000.000	14	110.000.000	14	120.000.000	14	130.000.000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				67.000.000		60.000.000		63.000.000		70.000.000		76.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	4	67.000.000	14	60.000.000	14	63.000.000	14	70.000.000	14	76.000.000		
7.01.04.2.02.001 - Koordinasi/S inergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan				67.000.000		60.000.000		63.000.000		70.000.000		76.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	0	4	67.000.000	14	60.000.000	14	63.000.000	14	70.000.000	14	76.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Republik Indonesia	Negara Republik Indonesia (Laporan)													
7.01.05 - PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTA HAN UMUM				279.939 .275		349.000 .000		376.000 .000		407.000 .000		440.000 .000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	279.939 .275	100	349.000 .000	100	376.000 .000	100	407.000 .000	100	440.000 .000	7.01.0.00.0. 00.05.0000 - KECAMATA N BALIKPAPA N SELATAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01 - Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				64.939. 525		80.000. 000		82.000. 000		85.000. 000		90.000. 000		
Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksana n Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahan kan dan memelihara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar	0	75	64.939. 525	100	80.000. 000	100	82.000. 000	100	85.000. 000	100	90.000. 000		

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01.0 001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan				64.939. 525		80.000. 000		82.000. 000		85.000. 000		90.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
Terlaksananya a Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila,	0	75	64.939. 525	100	80.000. 000	100	82.000. 000	100	85.000. 000	100	90.000. 000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan an dan Pemeliharaaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan	100	100	279.939.275	100	349.000.000	100	376.000.000	100	407.000.000	100	440.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0001 - KELURAHAN DAMAI BAHAGIA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)													
7.01.05.2.01 - Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				30.000. 000		38.500. 000		42.000. 000		46.000. 000		50.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	0	41	30.000.000	41	38.500.000	41	42.000.000	41	46.000.000	41	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pemertahan an dan Pemeliharaaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
7.01.05.2.01.0 001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,				30.000. 000		38.500. 000		42.000. 000		46.000. 000		50.000. 000		

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	0	41	30.000.000	41	38.500.000	41	42.000.000	41	46.000.000	41	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kesatuan Republik Indonesia	Pemertahan an dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	279.939 .275	100	349.000 .000	100	376.000 .000	100	407.000 .000	100	440.000 .000	7.01.0.00.0. 00.05.0002 - KELURAHA N SEPINGGA N RAYA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01 - Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				30.000. 000		38.500. 000		42.000. 000		46.000. 000		50.000. 000		
Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksana n Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahan kan dan memelihara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar	0	34	30.000. 000	34	38.500. 000	34	42.000. 000	34	46.000. 000	34	50.000. 000		



[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01.0 001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan				30.000. 000		38.500. 000		42.000. 000		46.000. 000		50.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	0	34	30.000.000	34	38.500.000	34	42.000.000	34	46.000.000	34	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan an dan Pemeliharaaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan	100	100	279.939 .275	100	349.000 .000	100	376.000 .000	100	407.000 .000	100	440.000 .000	7.01.0.00.0. 00.05.0003 - KELURAHA N DAMAI BARU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)													
7.01.05.2.01 - Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				27.999. 750		35.000. 000		40.000. 000		44.000. 000		48.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	0	22	27.999.750	22	35.000.000	22	40.000.000	22	44.000.000	22	48.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pemertahan an dan Pemeliharaaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
7.01.05.2.01.0 001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,				27.999. 750		35.000. 000		40.000. 000		44.000. 000		48.000. 000		

[illegible]



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	0	22	27.999.750	22	35.000.000	22	40.000.000	22	44.000.000	22	48.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kesatuan Republik Indonesia	Pemertahan an dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	279.939 .275	100	349.000 .000	100	376.000 .000	100	407.000 .000	100	440.000 .000	7.01.0.00.0. 00.05.0004 - KELURAHA N SEPINGGA N BARU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01 - Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				35.000. 000		38.500. 000		42.000. 000		46.000. 000		50.000. 000		
Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksana n Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahan kan dan memelihara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar	0	65	35.000. 000	65	38.500. 000	65	42.000. 000	65	46.000. 000	65	50.000. 000		

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01.0 001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan				35.000. 000		38.500. 000		42.000. 000		46.000. 000		50.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	0	65	35.000.000	65	38.500.000	65	42.000.000	65	46.000.000	65	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan an dan Pemeliharaaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan	100	100	279.939 .275	100	349.000 .000	100	376.000 .000	100	407.000 .000	100	440.000 .000	7.01.0.00.0. 00.05.0005 - KELURAHA N GUNUNG BAHAGIA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)													
7.01.05.2.01 - Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				30.000. 000		38.500. 000		42.000. 000		46.000. 000		50.000. 000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	0	59	30.000.000	59	38.500.000	59	42.000.000	59	46.000.000	59	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pemertahan an dan Pemeliharaaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
7.01.05.2.01.0 001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,				30.000. 000		38.500. 000		42.000. 000		46.000. 000		50.000. 000		

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	0	59	30.000.000	59	38.500.000	59	42.000.000	59	46.000.000	59	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kesatuan Republik Indonesia	Pemertahan an dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	279.939 .275	100	349.000 .000	100	376.000 .000	100	407.000 .000	100	440.000 .000	7.01.0.00.0. 00.05.0006 - KELURAHA N SEPINGGA N	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01 - Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				32.000. 000		40.000. 000		44.000. 000		48.000. 000		52.000. 000		
Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksana n Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahan kan dan memelihara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar	0	70	32.000. 000	70	40.000. 000	70	44.000. 000	70	48.000. 000	70	52.000. 000		

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01.0 001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan				32.000. 000		40.000. 000		44.000. 000		48.000. 000		52.000. 000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	0	70	32.000.000	70	40.000.000	70	44.000.000	70	48.000.000	70	52.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan an dan Pemeliharaaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan	100	100	279.939 .275	100	349.000 .000	100	376.000 .000	100	407.000 .000	100	440.000 .000	7.01.0.00.0. 00.05.0007 - KELURAHA N SUNGAI NANGKA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)													
7.01.05.2.01 - Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				30.000. 000		40.000. 000		42.000. 000		46.000. 000		50.000. 000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	0	46	30.000.000	46	40.000.000	46	42.000.000	46	46.000.000	46	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pemertahan an dan Pemeliharaaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
7.01.05.2.01.0 001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,				30.000. 000		40.000. 000		42.000. 000		46.000. 000		50.000. 000		

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	0	46	30.000.000	46	40.000.000	46	42.000.000	46	46.000.000	46	50.000.000		

[illegible]



#### 4.3 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sebagai upaya memastikan keterpaduan antara perencanaan kewilayahan di tingkat kecamatan dengan arah pembangunan daerah, disusun daftar subkegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut memuat subkegiatan terpilih yang memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian target RPJMD.

Tabel 4. 3

## Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN</b>				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	
			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
2.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
			7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
3.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
4.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			<p>7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun</p> <p>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0001 - KELURAHAN DAMAI BAHAGIA</b>				
5.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	
			<p>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <p>7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</p>	
6.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
7.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
8.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
7.01.0.00.0.00.05.0002 - KELURAHAN SEPINGGAN RAYA				

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
9.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan  Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
10.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
11.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
12.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0003 - KELURAHAN DAMAI BARU</b>				
13.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
14.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
15.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
16.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	
			1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
7.01.0.00.0.00.05.0004 - KELURAHAN SEPINGGAN BARU				
17.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	
			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
18.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
19.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
20.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0005 - KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA</b>				
21.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	
			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
22.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
23.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
24.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
7.01.0.00.0.00.05.0006 - KELURAHAN SEPINGGAN				
25.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
26.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
27.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
28.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	
			1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
7.01.0.00.0.00.05.0007 - KELURAHAN SUNGAI NANGKA				
29.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	
			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
30.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
31.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
32.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	



#### 4.4 Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Perangkat Daerah

Pada periode perencanaan sebelumnya, yaitu Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2021–2026, Kecamatan Balikpapan Selatan belum menetapkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) secara formal sebagai alat ukur pencapaian kinerja daerah pada tingkat kecamatan. Hal ini dikarenakan belum adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur kewajiban penyusunan IKD pada level kecamatan, serta keterbatasan sistem pengukuran kinerja yang tersedia saat itu.

Namun, seiring dengan perkembangan regulasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, termasuk pada level kecamatan, maka pada periode perencanaan tahun 2026–2030, Kecamatan Balikpapan Selatan telah menetapkan dan mengintegrasikan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, terukur, dan berorientasi hasil (result-based management).

Penyusunan IKD ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan perlunya indikator kinerja yang terukur dalam setiap dokumen perencanaan pembangunan.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2026–2030 dirumuskan untuk:

1. Mengukur capaian tujuan dan sasaran pembangunan kecamatan, sebagaimana tertuang dalam visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah.
2. Menjadi alat evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan secara lebih sistematis dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, khususnya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara efektif dan efisien.
4. Mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan secara keseluruhan, melalui kontribusi nyata pembangunan di tingkat kecamatan.

Dalam dokumen Renstra ini, IKD disusun berdasarkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound), dan dijabarkan secara langsung dalam tabel sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Selatan. Adapun IKD yang ditetapkan mencerminkan hasil-hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada kecamatan, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2026–2030.

Dengan ditetapkan IKD dalam Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2026–

2030, diharapkan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan dapat lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat, serta mendukung pencapaian visi Kota Balikpapan sebagai kota yang berkelanjutan, cerdas, dan berdaya saing.

Tabel 4. 4

Indikator Kinerja Daerah Kecamatan Balikpapan Selatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN												
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI											
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	Indeks yang menggambarkan hasil kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan eksternal yang diberikan oleh kecamatan	diperoleh dari kegiatan survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi berdasarkan (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara	81,33	81,5	81,75	82	82,25	82,5	82,75	Indikator Tujuan

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
				Pelayanan Publik)								
2	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	%	Persentase yang menggambarkan hasil evaluasi perkembangan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan kelurahan di Kecamatan	(Jumlah Kelurahan yang mendapatkan kategori 'Cepat Berkembang" / Jumlah Kelurahan di Wilayah Administratif Kecamatan x 100%) (Penetapan kategori sesuai Permendagri 81 tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan	100	85,71	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
				Desa dan Kelurahan)								
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan seberapa baik perangkat daerah tersebut dalam merencanakan, melaksanakan,	diperoleh dari evaluasi internal yang dilakukan oleh inspektorat daerah (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	70,31	71,22	71,98	72,73	73,49	74,24	75	Indikator Sasaran

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
			mengukur, dan melaporkan kinerjanya.									
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	Indeks yang menggambarkan hasil kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat (Pegawai) terhadap kualitas layanan internal yang diberikan oleh kecamatan	diperoleh dari kegiatan survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Sekretariat Kecamatan berdasarkan (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman	75,98	76	77	78	79	80	81	Indikator Program

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
				Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)								
5	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	Persentase yang menggambarkan partisipasi masyarakat mencakup kehadiran, kontribusi tenaga, materi maupun ide/gagasan dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana (misalnya gotong royong, perbaikan lingkungan, pembangunan fasilitas umum) dan kegiatan pemberdayaan masyarakat (misalnya	(Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pembangunan sarpras dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan / Jumlah masyarakat usia produktif di wilayah kecamatan) x 100 %	20,28	22,5	25	27,5	30	32,5	33	Indikator Program

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]



#### 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan merupakan tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan 2025–2029. Penyusunan IKU ini memperhatikan keselarasan terhadap RPJMD Kota Balikpapan dan prioritas pembangunan kewilayahan Kecamatan Balikpapan Selatan. Tabel berikut menyajikan daftar IKU Kecamatan Balikpapan Selatan beserta target kinerjanya, yang menjadi acuan dalam pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Tabel 4. 5

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Selatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN									
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	81,33	81,5	81,75	82	82,25	82,5	82,75	
3.	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	%	100	85,71	100	100	100	100	100	
4.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,31	71,22	71,98	72,73	73,49	74,24	75	

Tabel 4. 6

Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Balikpapan Selatan

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	7.01 - KECAMATAN										
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	positif	Indeks	81,33	81,5	81,75	82	82,25	82,5	82,75	
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	positif	Nilai	70,31	71,22	71,98	72,73	73,49	74,24	75	
4.	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	positif	%	100	85,71	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah		Indeks	75,98	76	77	78	79	80	81	
8.	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	positif	%	20,28	22,5	25	27,5	30	32,5	33	
10.	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan Penting dan Substansial

Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh kecamatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Beberapa substansi penting dari Renstra ini antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur, digitalisasi layanan, dan penguatan kepuasan masyarakat.
2. Penguatan kapasitas aparatur kecamatan agar lebih profesional, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan yang inklusif, ramah kelompok rentan, serta mendukung pelayanan prima.
4. Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat serta penguatan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan wilayah.
5. Penguatan koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah, kelurahan, aparat keamanan, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.
6. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Dengan substansi tersebut, Renstra ini diharapkan mampu menjawab isu strategis pembangunan kecamatan dan selaras dengan arah pembangunan Kota Balikpapan.

#### 5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan berpedoman pada kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, baik nasional, provinsi, maupun peraturan daerah.
2. Keterpaduan dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lain, terutama RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 dan RKPD tahunan.
3. Partisipatif, melibatkan masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
4. Efisiensi dan efektivitas, mengutamakan penggunaan sumber daya yang tepat guna dan tepat sasaran.
5. Transparansi dan akuntabilitas, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

#### 5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Agar pelaksanaan Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan dapat berjalan sesuai rencana, diperlukan mekanisme pengendalian dan evaluasi yang terstruktur, yaitu:



### 1. Pengendalian

- Dilakukan melalui pemantauan secara berkala atas pelaksanaan program dan kegiatan.
- Camat melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan oleh unit terkait, memastikan kesesuaian dengan rencana.
- Hasil pengendalian digunakan sebagai dasar perbaikan pelaksanaan pada periode berikutnya.

### 2. Evaluasi

- Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran Renstra.
- Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
- Hasil evaluasi disampaikan dalam bentuk laporan kinerja perangkat daerah (LKjIP), sebagai wujud akuntabilitas kinerja kecamatan kepada masyarakat dan Pemerintah Kota Balikpapan.

### 3. Tindak Lanjut

- Rekomendasi dari hasil pengendalian dan evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pada periode selanjutnya.
- Hasil evaluasi juga menjadi dasar penyusunan rencana kerja (Renja) kecamatan setiap tahun.

## 5.4 Penutup

Dengan disusunnya Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025–2029 ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan terarah. Keberhasilan implementasi Renstra ini sangat ditentukan oleh komitmen aparatur kecamatan, dukungan anggaran, serta partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman bersama dalam mewujudkan Kecamatan Balikpapan Selatan yang lebih maju, tertib, sejahtera, dan berdaya saing, serta mendukung tercapainya visi pembangunan Kota Balikpapan lima tahun ke depan.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, yang mengamanatkan Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Balikpapan Tahun 2005-2045. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025-2029 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025-2029 harus selaras / konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Timur disusun guna memberikan masukan / saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025-2029, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang - undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Balikpapan Timur dalam kurun waktu Tahun 2025-2029, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Balikpapan Timur untuk 5 (lima) tahun kedepan.

## 1.2. Landasan Hukum

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 disusun atas dasar:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 11);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045;
  23. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 20);
  24. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 54);

25. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2045.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, serta hambatan yang ada atau yang mungkin timbul. Dokumen Renstra sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Balikpapan pada unsur kewilayahan. Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai Dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam Menyusun Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Balikpapan Timur.
1. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Balikpapan Timur.
2. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Balikpapan Timur yang transparan dan akuntabel.

Tujuan penyusunan Renstra adalah memberikan arah dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan untuk mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang ada dalam rangka melaksanakan kewenangan tata pemerintahan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025 - 2029 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan di masa akan datang sejalan dengan visi dan misi yang telah ditentukan;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama (5) lima tahun kedepan;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Sebagai panduan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya agar lebih terarah, focus, dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu kepada Inmendagri No. 2 Tahun 2025 tentang Sistematika Renstra Perangkat Daerah Adalah sebagai berikut :

## **BAB I        Pendahuluan**

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

## **BAB II      Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Timur, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Balikpapan Timur. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

## **BAB III      Tujuan, Sasaran dan Arah Strategis Kebijakan**

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Kecamatan Balikpapan Timur yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Balikpapan tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Kecamatan Balikpapan Timur yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Balikpapan tahun 2025-2029.

## **BAB IV      Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

## **BAB V      Penutup**

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR**

#### **2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Balikpapan Timur**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

##### **2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Timur mengacu pada Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

##### **1. Camat**

Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelurahan sebagai perangkat kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, sesuai pasal 5, Camat mempunyai tugas :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;

- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
- j. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;
- k. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretaris Camat**

Sekretaris Camat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan, melaksanakan pelayanan administrasi umum dan tata usaha, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan masing-masing seksi.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian:

- a. Penyusunan program;
- b. Pengelolaan urusan keuangan;
- c. Kepegawaian;
- d. Rumah tangga kantor;
- e. Perlengkapan;
- f. Protokol;
- g. Hubungan masyarakat;
- h. Kearsipan;
- i. Surat menyurat; dan
- j. Evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat membawahi subbagian dan setiap subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang bertanggungjawab kepada sekretaris.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain:

- a. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- c. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- f. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. Pengelolaan anggaran kecamatan dan penerimaan Retribusi;
- h. Pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;



- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1) Subbagian Umum**

Subbagian umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
- g. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- i. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- k. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **2) Subbagian Program dan Keuangan**

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
  - 1. Rencana strategis;
  - 2. Rencana kerja;
  - 3. Rencana kerja tahunan;
  - 4. Penetapan kinerja; dan
  - 5. Laporan kinerja.
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;

- g. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- i. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
- j. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- k. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
- l. Menyusun laporan keuangan Kecamatan;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah Kecamatan;
- c. Memfasilitasi permasalahan pertanahan di wilayah Kecamatan;
- d. Melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan;
- e. Memfasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- f. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan;
- g. Menyusun dokumen monografi Kecamatan;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **4. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup**

Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan kemasyarakatan;
- c. Melaksanakan pengawasan rumah sewa/pondokan;
- d. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. Melaksanakan pengoordinasian pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin;
- f. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah Kecamatan;

- g. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- i. Memfasilitasi permasalahan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketenteraman dan ketertiban wilayah serta antisipasi bencana alam;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **5. Seksi Pembangunan Masyarakat**

Seksi Pembangunan Masyarakat dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat. Seksi Pembangunan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pembangunan masyarakat;
- b. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan;
- c. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan;
- d. Memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian;
- e. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
- f. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
- i. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program pembangunan Kelurahan dan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- j. Menyusun dokumen profil Kecamatan;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **6. Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial;
- b. Memfasilitasi penanggulangan bencana, pasca bencana dan pengungsi serta masalah sosial;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;

- d. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
- e. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat bergama;
- f. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
- g. Melaksanakan fasilitasi pembinaan program usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **7. Seksi Pelayanan Publik**

Seksi Pelayanan Publik, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi Pelayanan Publik;
- b. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan;
- d. Menyusun Standar Operasional Prosedur;
- e. Menyusun Standar Pelayanan;
- f. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
- g. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu;
- h. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- i. Mengelola layanan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan;
- j. Memfasilitasi dan menindaklanjuti hasil pengaduan warga terhadap pelayanan;
- k. Melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat;
- l. Melaksanakan tatakelola pelayanan publik;
- m. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
- n. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketenteraman, ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
- o. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pada kelurahan;
- p. Melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
- q. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
- r. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **8. Lurah**

Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kelurahan. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Dalam Pasal 17, Lurah mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. Melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat;
- d. Menyelenggarakan dan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- e. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Menyelenggarakan administrasi kependudukan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- h. Menyusun dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
- i. Membina lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **9. Sekretaris Lurah**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Lurah mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
  1. Rencana strategis;
  2. Rencana kerja;
  3. Rencana kerja tahunan;
  4. Penetapan kinerja; dan
  5. Laporan kinerja.
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- g. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- i. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;

- j. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- k. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
- l. Menyusun laporan keuangan kelurahan;
- m. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- n. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- o. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- p. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- q. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- r. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- s. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- t. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- u. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- v. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- w. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- x. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- y. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
- z. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- aa. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **10. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- d. Melaksanakan administrasi pertanahan;
- e. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
- f. Melaksanakan pembinaan rukun tetangga;
- g. Menyusun monografi Kelurahan;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
- i. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- j. Menyusun standar operasional dan prosedur pelayanan dan menyusun standar pelayanan lingkup kelurahan;
- k. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;

- l. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi pelayanan publik;
- m. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
- n. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang pelayanan;
- o. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
- p. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketenteraman dan Ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
- q. Melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
- r. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
- s. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **11. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup**

Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- b. Melaksanakan layanan bidang ketenteraman dan ketertiban serta layanan surat pengantar izin pertunjukan dan keramaian;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- d. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan;
- e. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;
- f. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- g. Memfasilitasi permasalahan di bidang ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan koordinasi ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup dengan instansi terkait, lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan rukun tetangga;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **12. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
- b. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadaya masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
- d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
- e. Melaksanakan pembinaan penataan pembangunan permukiman penduduk;
- f. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kelurahan;
- g. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- h. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat bergama;
- i. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
- j. Melaksanakan fasilitasi pendataan masyarakat rentan masalah sosial dan keluarga miskin;
- k. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial;
- l. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi pembinaan program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan;
- n. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kegiatan/program kesehatan masyarakat, kesehatan Ibu dan anak serta keluarga berencana;
- o. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha kesejahteraan rakyat;
- p. Melaksanakan fasilitasi penanggulangan korban bencana;
- q. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- r. Melaksanakan penyusunan profil kelurahan;
- s. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **• Struktur Organisasi**

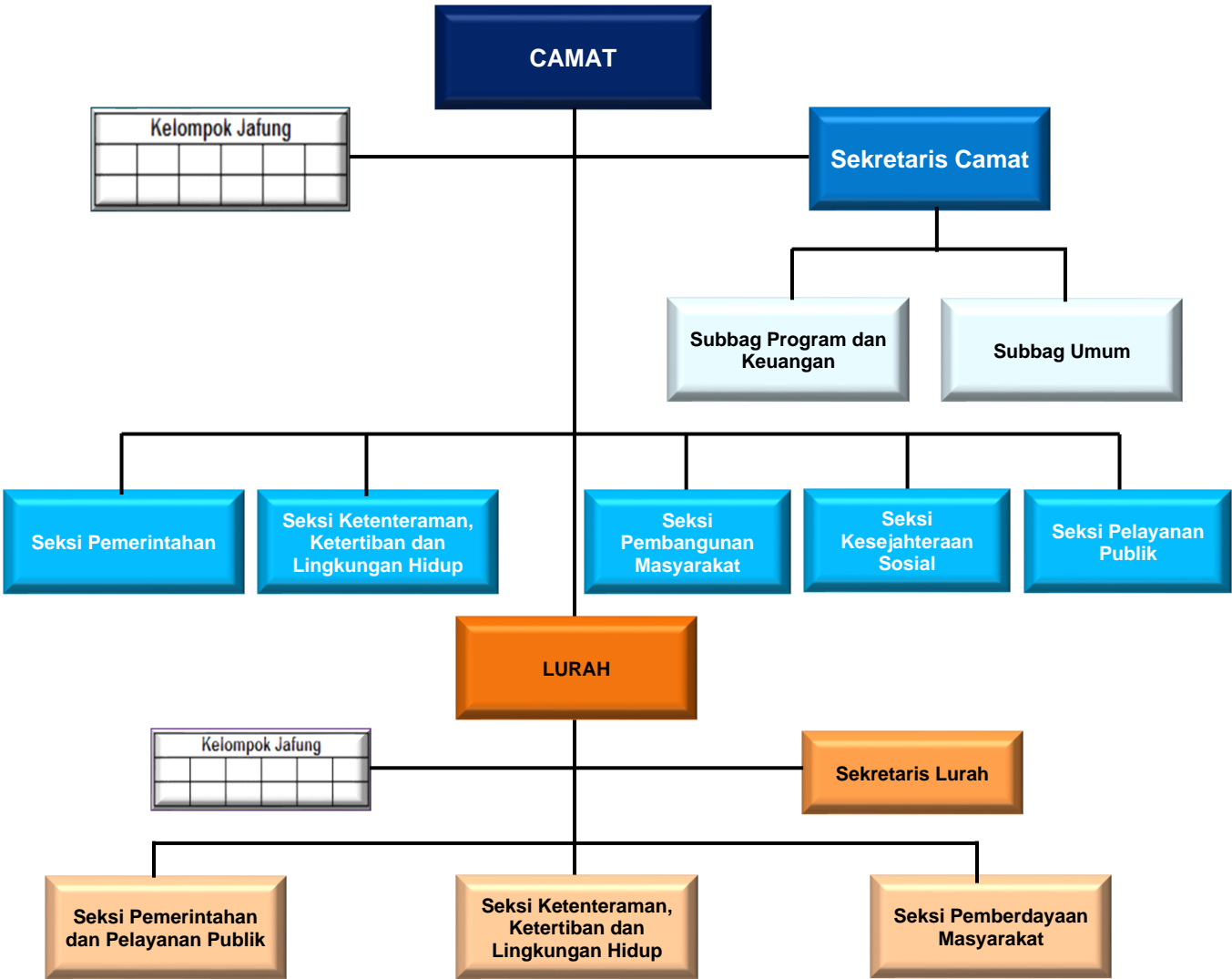
Untuk melaksanakan tugas pokoknya, struktur organisasi Kecamatan Balikpapan Timur terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
- c. Kasubbag Program dan Keuangan
- d. Kasubbag Umum
- e. Kepala Seksi Pemerintahan
- f. Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat
- g. Pembangunan Pelayanan Publik



- h. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
  - i. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Adapun struktur organisasi kelurahan terdiri dari :
- a. Lurah
  - b. Sekretaris Lurah
  - c. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
  - e. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Gambaran mengenai struktur organisasi Kecamatan Balikpapan Timur berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan digambarkan:



Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Timur  
Sumber: Kecamatan Balikpapan Timur, 2025

Camat sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Balikpapan Timur

Sumber daya manusia di Kecamatan Balikpapan Timur Per April 2025 berjumlah 18 orang Pegawai Negeri Sipil, 8 orang PPPK dan Tenaga Bantu 11 orang. Tenaga Bantu ini nantinya akan diusulkan sebagai PPPK Paruh waktu.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Balikpapan Timur mempunyai 4 (empat) Kelurahan didukung oleh sebanyak 54 orang pegawai, terdiri dari 25 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 14 orang PPPK dan 15 orang Tenaga Bantu. Bila digambarkan dengan tabel berdasarkan golongan, eselon dan juga tingkat pendidikan, maka dapat dilihat seperti di bawah ini.

Jumlah PNS Kecamatan dan Kelurahan dibedakan berdasarkan pangkat dan golongan, tingkat pendidikan, pejabat struktural dan penjenjangan yang ada di Kecamatan Balikpapan Timur pada Tahun 2025 adalah :

1. Berdasarkan Pangkat/Golongan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1  
Jumlah Pegawai (PNS) Berdasarkan Golongan

Pangkat	Golongan Ruang	Kecamatan		Kelurahan Lamaru		Kelurahan Manggar Baru		Kelurahan Teritip		Kelurahan Manggar	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pembina	IV/a	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penata Tingkat I	III/d	2	2	1	-	1	1	1	-	3	1
Penata	III/c	2	-	-	2	1	1	1	1	-	1
Penata Muda Tingkat I	III/b	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
Penata Muda	III/a	3									1
Pengatur Tingkat I	II/d	2	2	1					1		1
Pengatur	II/c	2				1		1			
Pengatur Muda Tngkat I	II/b			1							
Pengatur Muda	II/a							1			
PPPK	IX	1	3	1			1				1
PPPK	VII						1				
PPPK	V	-	-	-	3	-	2	1	1	-	2
PPPK	I		3						1		
Jumlah		18		1		10		9		10	

Sumber: Subbag Umum Kecamatan Balikpapan Timur 2025

2. Berdasarkan Eselon dapat dilihat pada Tabel 2.2, berikut :

Tabel 2.2  
Jumlah Pegawai (PNS) Berdasarkan Eselon

Tingkat	IIIa		IIIb		IVa		IVb		Non Eselon		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kecamatan Balikpapan	1	-	1	-	4	1	-	2	7	2	13	5

Tingkat	IIIa		IIIb		IVa		IVb		Non Eselon		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Timur												
Kelurahan Manggar	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	4	3
Kelurahan Manggar Baru	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	4	2
Kelurahan Lamaru	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	4	2
Kelurahan Teritip	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	5	1
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>9</b>		<b>15</b>		<b>17</b>		<b>43</b>	

Sumber: Subbag Umum Kecamatan Balikpapan Timur 2025

3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada table 2.3, berikut :

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai (PNS) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Strata 3 (S3)	-	-
2.	Strata 2 (S2)	2	4,65
3.	Strata 1 / Diploma 4 (S1/D4)	25	58,14
4.	Diploma 3 (D3)	2	4,65
5.	Diploma 1 (D1)	-	-
6.	SMA Sederajat	11	25,58
7.	SMP Sederajat	3	6,98
8.	SD Sederajat	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>43</b>	<b>100</b>

Sumber: Subbag Umum Kecamatan Balikpapan Timur 2025

4. Berdasarkan Diklat Penjenjangan dapat dilihat pada Tabel 2.4. berikut :

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai (PNS) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Diklat Struktural	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	DIKLAT PIM TK. III	2	8
2.	DIKLAT PIM TK. IV	23	92
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>100</b>

Sumber: Subbag Umum Kecamatan Balikpapan Timur 2025

Adapun Proyeksi Kebutuhan Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur dan kelurahan Adalah sebagai berikut :

➤ **Asset**

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Balikpapan Timur dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran

yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Tabel 2.5  
Sarana dan Prasarana Kecamatan Balikpapan Timur dan Kelurahan

No	Nama Barang/Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5	Baik
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I (Rumah Dinas Camat, Lurah Manggar, Manggar Baru, Lamaru dan Teritip)	5	4 Baik, 1 Rusak Berat
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan (Kantor RT Kelurahan Manggar Baru)	1	Baik
4	Tanah Bangunan Gudang (Gudang Serbaguna Kelurahan Teritip)	1	Baik
5	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan (Balai Pertemuan Kelurahan Manggar Baru)	1	Baik
6	Tanah Bangunan Terminal Darat	1	Baik
7	mesin proses lainnya (dst)	1	Baik
8	electric generating set lainnya (dst)	2	Baik
9	pompa lainnya (dst)	6	Baik
10	Mesin Bor Beton	1	Baik
11	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	2	Rusak Berat
12	Pick Up	1	
13	Sepeda Motor	20	
14	Mobil Jenazah	1	
15	Gerobak Dorong	4	Baik
16	Gergaji Chain Saw	3	Baik
17	perkakas bengkel kerja lainnya (dst)	1	Rusak Berat
18	Scanner (Universal Tester)	1	Baik
19	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	2	Baik
20	Rak-Rak Penyimpan	2	Baik
21	Lemari Penyimpan	2	Baik
22	Mesin Ketik Manual Standard (14-16	1	Baik
23	Mesin Penghitung Uang	1	Baik
24	Lemari Besi/Metal	9	8 Baik, 1 rusak berat
25	Lemari Kayu	1	Baik
26	Rak Besi	3	Baik
27	Filing Cabinet Besi	4	Baik
28	Brandkas	1	Baik
29	Buffet	1	Baik
30	Lemari Kaca	4	Baik
31	CCTV - Camera Control Television	23	Baik
32	Papan Visual/Papan Nama	1	Baik
33	Alat Penghancur Kertas	1	Baik
34	Mesin Absensi	3	Baik
35	Alat Pemotong Kertas	1	Kurang Baik
36	LCD Projector/Infocus	5	Baik
37	Focusing Screen/Layar LCD Projector	5	Baik
38	Papan Pengumuman	4	Baik
39	Alat Kantor Lainnya	7	Baik
40	Meja Kerja Besi/Metal	1	Baik
41	Meja Rapat	1	Baik
42	Meja Resepsionis	4	Baik
43	Meja 1/2 Biro	18	Baik
44	Kursi Fiber Glas/Plastik	318	Baik
45	Kursi Rapat	184	Baik
46	Kursi Tamu	3	Baik
47	Kursi Putar	21	Baik
48	Bangku Tunggu	2	Baik

No	Nama Barang/Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan
49	Meja Komputer	5	Baik
50	Sofa	5	Baik
51	Mesin Pemotong Rumput	3	Baik
52	Alat Pembersih lainnya	1	Rusak Berat
53	Lemari Es	2	Baik
54	A.C. Window	5	4 Baik, 1 rusak berat
55	A.C. Split	18	Baik
56	Kipas Angin	16	15 Baik, 1 rusak berat
57	Alat Pendingin lainnya	3	Baik
58	Kompore Gas (Alat Dapur)	3	Baik
59	Tabung Gas	2	Baik
60	Televisi	9	Baik
61	Sound System	5	Baik
62	Wireless	1	Baik
63	Megaphone	5	Baik
64	Alat Hiasan	1	Baik
65	Tangga Aluminium	5	Baik
66	Dispenser	4	Rusak Berat
67	Mimbar/Podium	1	Baik
68	Handy Cam	3	Baik
69	Karpet	2	Baik
70	Gordyin/Kray	36	Baik
71	Alat Rumah Tangga Lain-lain	13	Baik
72	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	2 baik, 4 Rusak Berat
73	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	11	10 baik, 1 Rusak Berat
74	Meja Kerja Pejabat lain-lain	4	Baik
75	Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	Baik
76	Meja Rapat Pejabat lainnya	6	Baik
77	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	Baik
78	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	Baik
79	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5	Baik
80	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	4	Baik
81	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	5	Baik
82	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1	Baik
83	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	7	Baik
84	Microphone/Wireless MIC	3	Baik
85	peralatan studio audio lainnya (dst)	7	Baik
86	Lensa Kamera	3	Baik
87	Layar Film/Projector	1	Baik
88	Camera Conference	5	Baik
89	Handy Talky (HT)	5	Baik
90	Facsimile	1	Baik
91	alat komunikasi lainnya lainnya (dst)	1	Baik
92	sumber tenaga lainnya (dst)	1	Baik
93	Distiling Apparatus	1	Baik
94	P.C Unit	26	25 Baik, 1 rusak berat
95	Lap Top	30	29 Baik, 1 rusak berat
96	Note Book	6	5 baik, 1 Rusak Berat
97	Printer (Peralatan Personal Komputer)	42	39 Baik, 3 rusak berat
98	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
99	Peralatan Personal Komputer lainnya	4	Baik

No	Nama Barang/Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan
100	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik
101	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Baik
102	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	1	Baik
103	Bangunan Klinik/Puskesmas	10	Baik
104	Bangunan Posyandu	3	Baik
105	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	13	Baik
106	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	2	Baik
107	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	1	Baik
108	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	1	Baik
109	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	Baik
110	Jalan Kabupaten Lokal	4	Baik
111	Jalan Kabupaten Lain-lain	7	Baik
112	Jalan Kota Lokal	7	Baik
113	Jalan Khusus Lainnya	1	Baik
114	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri	1	Baik
115	Jembatan Kabupaten/kota Lain-lain	1	Baik
116	Jembatan Pada Jalan Kota Lokal	1	Baik
117	Saluran Drainage	6	Baik
118	Bangunan Pengamanan Air Kotor Lain-lain	1	Baik
119	Bangunan air kotor lainnya	1	Baik
120	Sumur Resapan	1	Baik
121	Instalasi Air Kotor Lain-lain	1	Baik
122	Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	2	Baik
123	Instalasi Penangkal Petir Manual	1	Baik
124	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	Baik
125	Jaringan listrik lainnya	1454	Baik
126	Ilmu Pengetahuan Umum	3	Baik
127	Pendidikan	1	Baik
128	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	1	Baik

Sumber: Kartu Inventaris Barang Kecamatan Balikpapan Timur & Kelurahan 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Timur

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik kepada setiap warganya tanpa membedakan suku bangsa dan agama. Karena pelayanan terbaik merupakan hak yang pantas diterima oleh setiap warga masyarakat. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang mengutamakan kepuasan masyarakat baik dari segi sikap ramah dan santun petugas pelayanan, kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan, kemudahan layanan yang diberikan, kenyamanan sarana prasarana gedung pelayanan dan layanan yang bersifat responsive gender. Adapun jenis pelayanan yang diberikan di Kecamatan Balikpapan Timur adalah jenis pelayanan administrasi dengan pola pelayanan teknis fungsional dan pola pelayanan elektronik. Pola Pelayanan Kecamatan menggunakan suatu sistem terpadu yang disebut Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan yang proses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui satu loket pelayanan, warga cukup menyerahkan berkas ke petugas meja/loket pelayanan, duduk menunggu sejenak, kemudian dipanggil untuk menerima dokumen yang sudah selesai.

Jenis layanan yang tersedia di Kecamatan Balikpapan Timur antara lain :

- 1. Layanan Penerbitan Izin Membuka Tanah Negara < 5.000 M2;

2. Layanan Penerbitan Perpanjangan Izin Membuka Tanah Negara;
3. Layanan Surat Pernyataan Ahli Waris;
4. Layanan Dispensasi Nikah;
5. Layanan Surat Keterangan;
6. Layanan Cetak Kartu Keluarga.
7. Layanan Cetak KTP

Berdasarkan sasaran / target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Timur, dengan rincian sebagaimana tabel Tabel 2.6. di bawah ini :





Tabel 2.6  
Pencapaian Kinerja Kecamatan Balikpapan Timur

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan				77.96	78	78.10	78.20	78.30	81.51	81.03	89.46			104.55	103.88	111.83		
2	Nilai Sakip Kecamatan Balikpapan Timur				69.35	69.45	69.55	69.65	69.75	69.06	66.25	68.26			95.26	95.53	98.15		

Sumber : LKjIP Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2024

Dari tabel 2.6 di atas dengan melihat target Renstra pada 5 (lima) tahun sebelumnya dan pencapaian selama 5 (lima) tahun sebelumnya maka dapat digambarkan bahwa pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Timur sudah cukup optimal. Dengan melihat trend tersebut, dapat dibuat suatu perencanaan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang agar pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Timur lebih optimal.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan Kecamatan Balikpapan Timur adalah minimnya sumber daya manusia baik dari kualitas maupun kuantitas yang dimiliki oleh Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, sehingga dibutuhkan adanya pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis terkait pelayanan publik.

#### 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Balikpapan Timur

Tugas pokok Kecamatan Balikpapan Timur yaitu koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Kecamatan Balikpapan Timur, maka yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu :

- a. Unsur pimpinan (Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah), pelaporan data dan kondisi kependudukan, pelayanan dan hal-hal yang sesuai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan wilayah kecamatan.
- b. Perangkat Daerah Kota Balikpapan dalam hal pelaporan dan pemberian informasi kepada instansi/unit kerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- c. Pemangku kepentingan dalam hal menajering aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan.
- d. Kelurahan di wilayah Kecamatan Balikpapan Timur.
- e. Seluruh masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur dalam hal pelayanan, perizinan dan non perizinan.

## 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Balikpapan Timur

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Balikpapan Timur

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Timur dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Balikpapan Timur yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

2. Masih rendahnya keterlibatan komponen masyarakat dalam Pembangunan
3. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif
4. Masih tingginya kasus Pencemaran Lingkungan
5. Kurang ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum
6. Meningkatnya Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat
7. Meningkatnya Jumlah Penduduk dan Mobilitas Masyarakat
8. Belum optimalnya penanganan bencana
9. Relokasi Gedung kantor kelurahan karena sudah tidak representative
10. Masih beroperasinya Lokalisasi Manggarsari

#### 2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan uraian tentang gambaran Pelayanan yang telah ditelaah sesuai Visi Misi Kota Balikpapan maka Kecamatan Balikpapan Timur dapat menentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

Tabel 2.7  
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Balikpapan Timur

NO	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
	(Kewenangan PD)	(Sumber dari data capaian kinerja periode sebelumnya) Gap capaian dan ekspektasi	(KLHS RPJMD/Ranwal)	Global	Nasional	Regional	Kesimpulan
				Indikator Global	Indikator Nasional	Indikator Lokal	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	Belum optimalnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik  Masih rendahnya keterlibatan komponen masyarakat dalam pembangunan  Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif  Masih tingginya kasus Pencemaran Lingkungan Kurang ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum	masih adanya pelanggaran terhadap peraturan pemerintah	Perubahan Iklim, Urbanisasi/Mobilitas Masyarakat Internalisasional	Pembangunan Ibukota Negara Nusantara(IKN)	Isu Strategis dalam RPJMD Kota Balikpapan: Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Tingkat Kecamatan

NO	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
	(Kewenangan PD)	(Sumber dari data capaian kinerja periode sebelumnya) Gap capaian dan ekspektasi	(KLHS RPJMD/Ranwal)	Global	Nasional	Regional	Kesimpulan
				Indikator Global	Indikator Nasional	Indikator Lokal	
		Meningkatnya Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat  Meningkatnya Jumlah Penduduk dan Mobilitas Masyarakat  Belum optimalnya penanganan bencana  Relokasi Gedung kantor kelurahan karena sudah tidak representative  Masih beroperasinya lokalisasi Manggarsari					

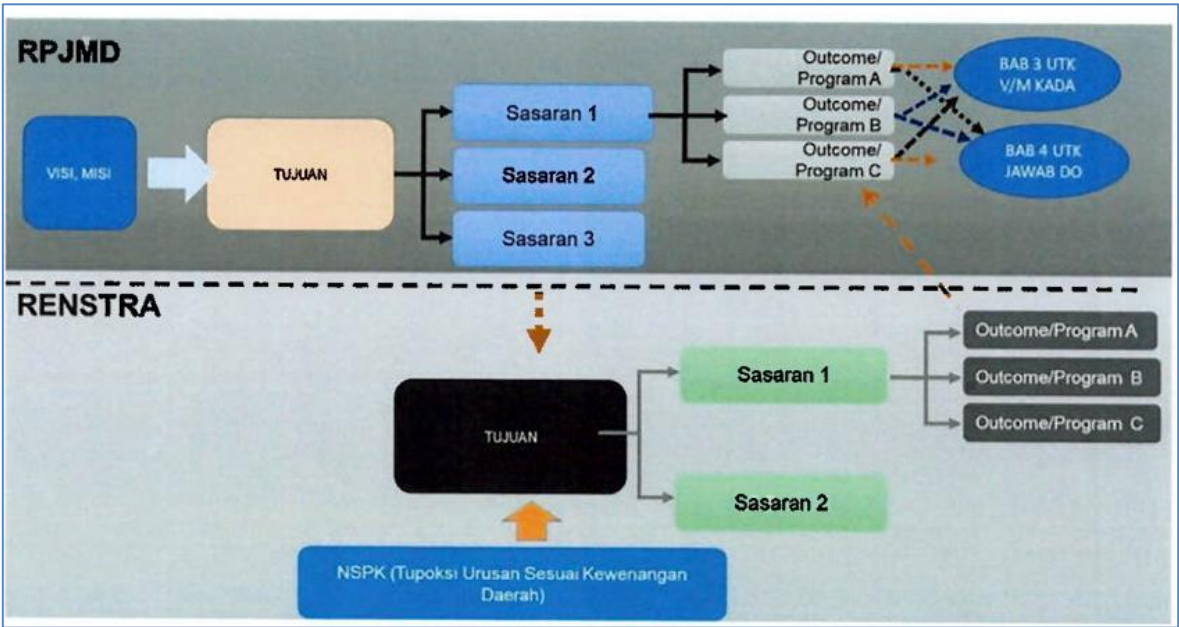
**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Balikpapan Timur

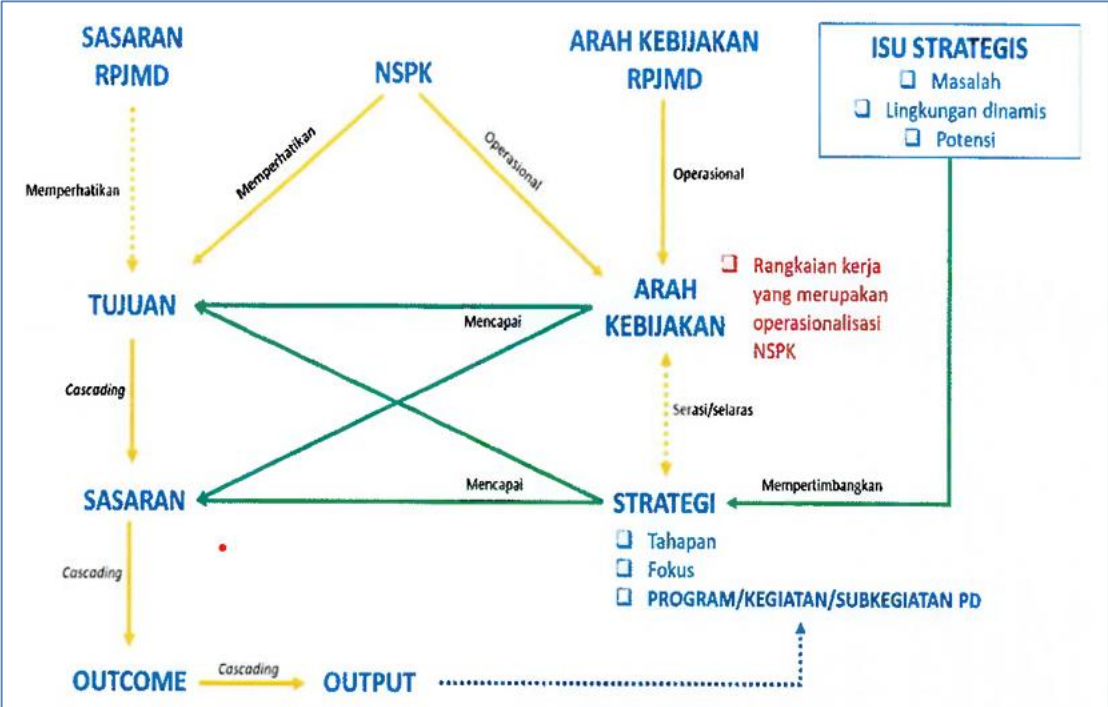
Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap Pemerintah Daerah Kota Balikpapan serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2025-2029 dan berdasarkan potensi, isu- isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan Kantor Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan.

Adapun tema RPJMD tahun 2025-2029 adalah “Penguatan Fondasi Transformasi: Balikpapan Kota Cerdas dan Kolaboratif.” mengandung arti berbagai tantangan dan peluang dalam pembangunan kota yang modern, berkelanjutan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kota Balikpapan mengusung konsep sebagai kota layak huni (liveable city), yang pada dasarnya mencerminkan prinsip kota berkelanjutan (sustainable city) dengan tujuan utama menjaga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tujuan Renstra Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan”, tujuan ini menggambarkan upaya untuk membuat pelayanan public di Tingkat kecamatan lebih efektif, efisien dan responsive terhadap kebutuhan Masyarakat.



Gambar 3.1  
Konsep Renstra Perangkat Daerah  
Sumber : Inmendagri No. 2 Tahun 2025



Gambar 3.2.  
Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah  
Sumber : Inmendagri No. 2 Tahun 2025

Tujuan dan Sasaran dari Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan yang akan mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.1, berikut :

Tabel 3.1.  
Teknik Merumuskan Sasaran dan Tujuan Renstra Perangkat Daerah

11	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR											
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	89,46	89,55	89,64	89,73	89,82	89,91	90	Pengampu Camat
		Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan (%)	100	75	100	100	100	100	100	Pengampu Camat
		Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	68,26	69,33	69,5	70	71	72	73	Pengampu Camat



Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.

### 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kota Balikpapan secara efektif dan berkelanjutan.

Perumusan pernyataan strategi Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan dalam 5 (lima) tahun mendatang dilakukan dengan merumuskan tahapan/langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan:

1. Pengkajian sasaran jangka menengah periode sebelumnya dan yang akan datang;
2. Pengkajian gambaran umum pelayanan, capaian dan permasalahan pembangunan, serta isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap strategi yang akan dipilih.

Sedangkan perumusan arah dan kebijakan, dirumuskan dengan menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih realistis, memperjelas strategi sehingga lebih fokus (kelompok sasaran/ lokus), konkrit, dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target- target tujuan dan sasaran.

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan dalam 5 (lima) tahun mendatang dengan Pentahapan Renstra Kecamatan Balikpapan Timur dapat dilihat pada Tabel. 3.2, berikut :

Tabel 3.2.  
Pentahapan Renstra Kecamatan Balikpapan Timur

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penataan dan Pembinaan Wilayah Pemekaran di Kecamatan Balikpapan Timur (Pemekaran RT dan Pemekaran Kelurahan Manggar )	Penataan Kawasan Pertanian (Ketahanan Pangan) di Kelurahan Teritip	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Embarkasi Haji Balikpapan	<div>- Penataan Kawasan Ekonomi di Jembatan Manggar(PKL dan UMKM)</div> <div>- Pembangunan Wisata Kuliner Bahari</div>	Penertiban Lokalisasi Manggar Sari

Dalam rangka mencapai tujuan RPJMD tahun 2025-2029, maka diperlukan untuk merumuskan arah kebijakan Kecamatan Balikpapan Timur yang selaras dengan Misi 1 MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN PEMERINTAH YANG BERSIH DAN PROFESSIONAL BERORIENTASI PADA PELAYANAN MASYARAKAT untuk memastikan keterkaitan kebijakan nasional, Daerah dan Perangkat Daerah secara sistematis.

Hasil Perumusan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Balikpapan Timur dapat dilihat pada tabel 3.3.

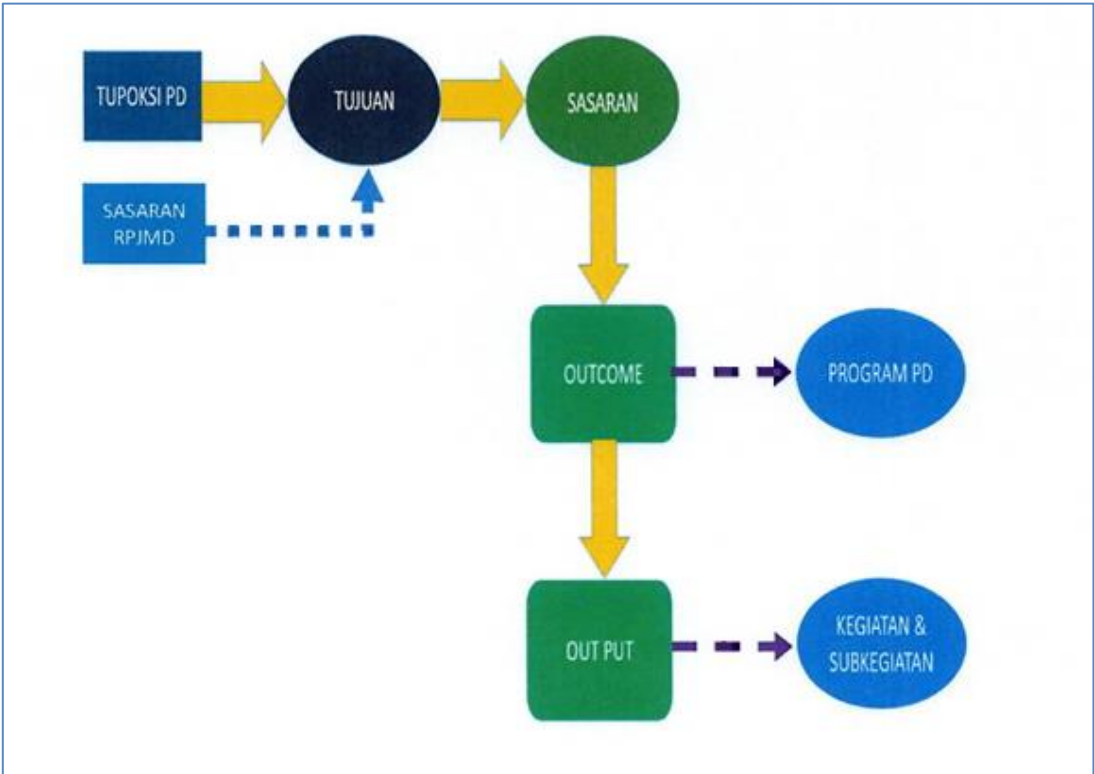
Tabel 3.3.  
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Balikpapan Timur

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan PD	Keterangan
1	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Pengembangan SPBE untuk meningkatkan kualitas pelayanan	<div>Penguatan Pelayanan Publik</div> <div>Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal</div> <div>Penguatan Pemberdayaan Masyarakat</div> <div>Penguatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</div> <div>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan</div> <div>Pengembangan Sumber Daya Manusia Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</div>	

**BAB IV**  
**PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah diperlukan suatu instrumen berupa rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 4.1, berikut :



Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah  
Sumber : Inmendagri No. 2 Tahun 2025

Program, kegiatan, dan subkegiatan tersebut disusun dengan memperhatikan:

1. **Kebijakan nasional, provinsi, dan kota**, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025–2029, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. **Kewenangan kecamatan** sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota, khususnya dalam bidang penyelenggaraan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, serta urusan pemerintahan umum.
3. **Isu strategis, tujuan, dan sasaran pembangunan kecamatan** yang telah diidentifikasi pada bab sebelumnya, sehingga program dan kegiatan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan yang dihadapi Kecamatan Balikpapan Timur.
4. **Prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas** dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pelayanan, serta partisipasi aktif masyarakat.

Rencana program, kegiatan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Adapun

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Balikpapan Timur tersaji pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.  
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERA NGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR</b>							
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)		
		Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan			Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan (%)		
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERA NGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				pemerintahan di tingkat kecamatan	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam		Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERA NGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Pembangunan di Kecamatan		prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)		
					Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERA NGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Tercapainya keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
					Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	7.01.03.2.03.0005 - Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terwujudnya kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial		Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terwujudnya kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhineka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Kesatuan Republik Indonesia			
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
		Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERA NGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERA NGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terwujudnya profesionalisme aparatur perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERA NGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	
				Terwujudnya layanan umum perkantoran perangkat daerah.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERA NGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERA NGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terwujudnya operasional umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERA NGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERA NGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
<b>7.01.0.00.0.00.06.0001 - KELURAHAN LAMARU</b>							
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan		Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terselenggaranya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERA NGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan		Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERA NGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	



<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERA NGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Tercapainya keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERA NGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terwujudnya kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial		Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terwujudnya kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhineka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
<b>7.01.0.00.0.00.06.0002 - KELURAHAN MANGGAR BARU</b>							
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan		Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERA NGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terselenggaranya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan  Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan		Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERA NGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Tercapainya keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terwujudnya kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial		Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terwujudnya kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhineka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Kesatuan Republik Indonesia			
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

**7.01.0.00.0.00.06.0003 - KELURAHAN TERITIP**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan		Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terselenggaranya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan  Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan		Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERA NGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)		
					Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Tercapainya keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERA NGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terwujudnya kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Republik Indonesia (Laporan)		
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial		Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terwujudnya kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERA NGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				melestarikan Bhineka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERA NGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>7.01.0.00.0.00.06.0004 - KELURAHAN MANGGAR</b>							
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan		Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terselenggaranya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan  Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan		Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERA NGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)		
					Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Tercapainya keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERA NGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terwujudnya kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERA NGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Republik Indonesia (Laporan)		
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial		Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terwujudnya kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Bhineka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

4.2. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan 2025–2029, disusun rencana program, kegiatan, dan subkegiatan beserta pendanaan indikatif sebagai acuan pelaksanaan pembangunan di tingkat kewilayahan. Tabel berikut menyajikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan dengan alokasi pendanaan.

Tabel 4.2.  
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Kecamatan Balikpapan Timur

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				32.313.369.000		31.186.412.00 0		32.745.733.00 0		33.400.648.00 0		34.402.667.00 0		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA				19.613.895.880		20.194.012.00 0		21.485.333.00 0		21.934.648.00 0		22.731.667.00 0		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraa n pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)	79,8	81	19.613.895.880	82	20.194.012.00 0	83	21.485.333.00 0	84	21.934.648.00 0	85	22.731.667.00 0	7.01.0.0 0.0.00.0 6.0000 - KECAM ATAN BALIKP APAN TIMUR	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah														
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				47.000.000		49.000.000		51.000.000		53.000.000		55.000.000		
Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	3	47.000.000	4	49.000.000	4	51.000.000	4	53.000.000	5	55.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	3		3		3		3		3			
7.01.01.2.01.00 01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				22.000.000		23.000.000		24.000.000		25.000.000		26.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	3	22.000.000	4	23.000.000	4	24.000.000	4	25.000.000	5	26.000.000		
7.01.01.2.01.00 07 - Evaluasi Kinerja				25.000.000		26.000.000		27.000.000		28.000.000		29.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perangkat Daerah														
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	3	25.000.000	3	26.000.000	3	27.000.000	3	28.000.000	3	29.000.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.953.599.000		11.835.000.000		12.635.333.000		12.683.198.000		13.012.667.000		
Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	43	67	10.953.599.000	77	11.835.000.000	77	12.635.333.000	77	12.683.198.000	77	13.012.667.000		
7.01.01.2.02.00 01 - Penyediaan				10.953.599.000		11.835.000.000		12.635.333.000		12.683.198.000		13.012.667.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Gaji dan Tunjangan ASN														
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	43	67	10.953.599.000	77	11.835.000.00 0	77	12.635.333.00 0	77	12.683.198.00 0	77	13.012.667.00 0		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.083.648.520		952.000.000		968.000.000		1.019.000.000		1.070.000.000		
Terwujudnya profesionalisme aparatur perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	0	75	1.083.648.520	77	952.000.000	77	968.000.000	77	1.019.000.000	77	1.070.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				56.148.520		67.000.000		68.000.000		69.000.000		70.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	56.148.520	1	67.000.000	1	68.000.000	1	69.000.000	1	70.000.000		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan				1.027.500.000		885.000.000		900.000.000		950.000.000		1.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perundang- Undangan														
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	0	75	1.027.500.000	77	885.000.000	77	900.000.000	77	950.000.000	77	1.000.000.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.286.707.650		2.073.500.000		2.118.000.000		2.143.000.000		2.172.000.000		
Terwujudnya layanan umum perkantoran perangkat daerah.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	25	12	2.286.707.650	12	2.073.500.000	12	2.118.000.000	12	2.143.000.000	12	2.172.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	24	24		24		24		24		24			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip	0	0		100		150		200		250			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dinamis pada SKPD (Dokumen)													
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	500	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	34	43		43		43		43		43			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	13	10		10		10		10		10			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0		1		1		1		1			
7.01.01.2.06.00 01 - Penyediaan				99.993.705		50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1	99.993.705	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000		
7.01.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				518.662.735		520.000.000		522.000.000		523.000.000		525.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	25	12	518.662.735	12	520.000.000	12	522.000.000	12	523.000.000	12	525.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Disediakan (Paket)													
7.01.01.2.06.00 03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000		
7.01.01.2.06.00 04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				545.919.730		546.000.000		552.000.000		553.000.000		555.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	13	10	545.919.730	10	546.000.000	10	552.000.000	10	553.000.000	10	555.000.000		
7.01.01.2.06.00 05 - Penyediaan				324.941.270		160.000.000		176.000.000		178.000.000		180.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Barang Cetakan dan Penggandaan														
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	5	324.941.270	5	160.000.000	5	176.000.000	5	178.000.000	5	180.000.000		
7.01.01.2.06.00 06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				71.750.000		72.000.000		73.000.000		74.000.000		75.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	24	24	71.750.000	24	72.000.000	24	73.000.000	24	74.000.000	24	75.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Disediakan (Dokumen)													
7.01.01.2.06.00 08 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				119.995.132		50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	500	12	119.995.132	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	12	65.000.000		
7.01.01.2.06.00 09 - Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				605.445.078		605.500.000		606.000.000		607.000.000		610.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi	34	43	605.445.078	43	605.500.000	43	606.000.000	43	607.000.000	43	610.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Konsultasi SKPD	dan Konsultasi SKPD (Laporan)													
7.01.01.2.06.00 10 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		10.000.000		12.000.000		14.000.000		16.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	0	100	10.000.000	150	12.000.000	200	14.000.000	250	16.000.000		
7.01.01.2.06.00 11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0		10.000.000		12.000.000		14.000.000		16.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0	0	1	10.000.000	1	12.000.000	1	14.000.000	1	16.000.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				640.860.000		700.000.000		838.000.000		860.000.000		925.000.000		
Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9	5	640.860.000	5	700.000.000	5	838.000.000	5	860.000.000	5	925.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	10	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		1		1		1			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		1		1		1			
7.01.01.2.07.00 01 - Pengadaan Kendaraan Perorangan				105.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	10	1	105.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000		
7.01.01.2.07.00 02 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				535.860.000		540.000.000		594.000.000		600.000.000		650.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9	5	535.860.000	5	540.000.000	5	594.000.000	5	600.000.000	5	650.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	yang Disediakan (Unit)													
7.01.01.2.07.00 05 - Pengadaan Mebel				0		50.000.000		55.000.000		58.000.000		60.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	50.000.000	1	55.000.000	1	58.000.000	1	60.000.000		
7.01.01.2.07.00 06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		12.000.000		13.000.000		14.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000		
7.01.01.2.07.00 09 - Pengadaan Gedung Kantor				0		0		45.000.000		46.000.000		47.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	1	45.000.000	1	46.000.000	1	47.000.000		
7.01.01.2.07.00 11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		12.000.000		13.000.000		14.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	0	0	0	0	0	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Lainnya yang Disediakan (Unit)													
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.706.806.560		2.745.512.000		2.972.000.000		3.220.450.000		3.493.000.000		
Terwujudnya operasional umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.706.806.560	36	2.745.512.000	36	2.972.000.000	36	3.220.450.000	36	3.493.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12	12		36		36		36		36			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)													
7.01.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				490.000.000		500.000.000		502.000.000		504.000.000		505.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	490.000.000	36	500.000.000	36	502.000.000	36	504.000.000	36	505.000.000		
7.01.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.216.806.560		2.245.512.000		2.470.000.000		2.716.450.000		2.988.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.216.806.560	36	2.245.512.000	36	2.470.000.000	36	2.716.450.000	36	2.988.000.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.895.274.150		1.839.000.000		1.903.000.000		1.956.000.000		2.004.000.000		
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	0	2	1.895.274.150	2	1.839.000.000	2	1.903.000.000	2	1.956.000.000	2	2.004.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
berfungsi optimal.	Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit)													
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	107	298		298		298		300		300			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)						1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	1	1		1		1		1		1			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pajaknya (Unit)													
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	33	42		42		42		42		42			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit)	5	5		8		8		8		8			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09.00 01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				23.807.000		24.000.000		25.000.000		26.000.000		27.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	23.807.000	1	24.000.000	1	25.000.000	1	26.000.000	1	27.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09.00 02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				698.522.650		700.000.000		705.000.000		710.000.000		715.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	33	42	698.522.650	42	700.000.000	42	705.000.000	42	710.000.000	42	715.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Perizinannya (Unit)													
7.01.01.2.09.00 05 - Pemeliharaan Mebel				0		0		12.000.000		13.000.000		14.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)			0		0	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000		
7.01.01.2.09.00 06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				308.734.500		250.000.000		275.000.000		300.000.000		320.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	107	298	308.734.500	298	250.000.000	298	275.000.000	300	300.000.000	300	320.000.000		
7.01.01.2.09.00 09 - Pemeliharaan/				799.810.000		800.000.000		820.000.000		840.000.000		860.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit)	5	5	799.810.000	8	800.000.000	8	820.000.000	8	840.000.000	8	860.000.000		
7.01.01.2.09.00 11 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				64.400.000		65.000.000		66.000.000		67.000.000		68.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/	Jumlah Sarana dan	0	2	64.400.000	2	65.000.000	2	66.000.000	2	67.000.000	2	68.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit)													
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				940.379.630		960.000.000		974.000.000		983.000.000		991.000.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan	Persentase Koordinasi Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan	100	100	940.379.630	100	960.000.000	100	974.000.000	100	983.000.000	100	991.000.000	7.01.0.0 0.0.00.0 6.0000 - KECAM ATAN BALIKP	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Publik di Kecamatan	Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)												APAN TIMUR	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				539.665.000		540.000.000		542.000.000		544.000.000		546.000.000		
Terlaksananya koordinasi penyelenggaraa n kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	4	6	539.665.000	6	540.000.000	6	542.000.000	6	544.000.000	6	546.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)													
7.01.02.2.01.00 01 - Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				539.665.000		540.000.000		542.000.000		544.000.000		546.000.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan	4	6	539.665.000	6	540.000.000	6	542.000.000	6	544.000.000	6	546.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)													
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				50.000.000		52.000.000		60.000.000		63.000.000		65.000.000		
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	824	850	50.000.000	850	52.000.000	850	60.000.000	850	63.000.000	850	65.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Standar Pelayanan														
7.01.02.2.04.00 01 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				50.000.000		52.000.000		60.000.000		63.000.000		65.000.000		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	824	850	50.000.000	850	52.000.000	850	60.000.000	850	63.000.000	850	65.000.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraa	Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggara	100	100	940.379.630	100	960.000.000	100	974.000.000	100	983.000.000	100	991.000.000	7.01.0.0 0.0.00.0 6.0001 - KELURA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
n Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	an Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)												HAN LAMAR U	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				88.592.785		92.000.000		93.000.000		94.000.000		95.000.000		
Terselenggarany a kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	0	4	88.592.785	4	92.000.000	4	93.000.000	4	94.000.000	4	95.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)													
7.01.02.2.01.00 01 - Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				88.592.785		92.000.000		93.000.000		94.000.000		95.000.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi	0	4	88.592.785	4	92.000.000	4	93.000.000	4	94.000.000	4	95.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)													
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	100	100	940.379.630	100	960.000.000	100	974.000.000	100	983.000.000	100	991.000.000	7.01.0.0 0.0.00.0 6.0002 - KELURA HAN MANGG AR BARU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				79.161.845		92.000.000		93.000.000		94.000.000		95.000.000		
Terselenggarany a kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	4	79.161.845	4	92.000.000	4	93.000.000	4	94.000.000	4	95.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.01.00 01 - Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				79.161.845		92.000.000		93.000.000		94.000.000		95.000.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	0	4	79.161.845	4	92.000.000	4	93.000.000	4	94.000.000	4	95.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Instansi Vertikal Terkait	Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)													
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)	100	100	940.379.630	100	960.000.000	100	974.000.000	100	983.000.000	100	991.000.000	7.01.0.0 0.0.00.0 6.0003 - KELURA HAN TERITIP	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				91.010.000		92.000.000		93.000.000		94.000.000		95.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	4	91.010.000	4	92.000.000	4	93.000.000	4	94.000.000	4	95.000.000		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				91.010.000		92.000.000		93.000.000		94.000.000		95.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
Terlaksananya Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	4	91.010.000	4	92.000.000	4	93.000.000	4	94.000.000	4	95.000.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi	Persentase pelaksanaan koordinasi	100	100	940.379.630	100	960.000.000	100	974.000.000	100	983.000.000	100	991.000.000	7.01.0.0 0.0.00.0 6.0004 -	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)												KELURA HAN MANGG AR	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				91.950.000		92.000.000		93.000.000		94.000.000		95.000.000		
Terselenggarany a kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	0	4	91.950.000	4	92.000.000	4	93.000.000	4	94.000.000	4	95.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)													
7.01.02.2.01.00 01 - Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				91.950.000		92.000.000		93.000.000		94.000.000		95.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	4	91.950.000	4	92.000.000	4	93.000.000	4	94.000.000	4	95.000.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				10.307.904.370		8.549.400.000		8.776.400.000		8.946.000.000		9.116.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100	10.307.904.370	100	8.549.400.000	100	8.776.400.000	100	8.946.000.000	100	9.116.000.000	7.01.0.0 0.0.00.0 6.0000 - KECAM ATAN BALIKP APAN TIMUR	
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	16,5 5	18		20		22		24		26			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				225.000.000		229.000.000		232.000.000		235.000.000		240.000.000		
Terselenggarany a kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	3	3	225.000.000	3	229.000.000	3	232.000.000	3	235.000.000	3	240.000.000		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakat an)	65	55		55		55		55		55			
7.01.03.2.02.00 01 -				100.000.000		102.000.000		104.000.000		106.000.000		110.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	65	55	100.000.000	55	102.000.000	55	104.000.000	55	106.000.000	55	110.000.000		
7.01.03.2.02.00 04 - Evaluasi Kelurahan				125.000.000		127.000.000		128.000.000		129.000.000		130.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	3	3	125.000.000	3	127.000.000	3	128.000.000	3	129.000.000	3	130.000.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Kecamatan				870.335.000		1.128.000.000		1.232.000.000		1.290.000.000		1.347.000.000		
Tercapainya keaktifan lembaga kemasyarakata n di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	0	234	870.335.000	234	1.128.000.000	234	1.232.000.000	234	1.290.000.000	234	1.347.000.000		
	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan	2	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Teknologi Tepat Guna (Laporan)													
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembanga n Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarak an (Lembaga Kemasyarakatan)	5	3		3		3		3		3			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	0	0		0		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	an yang Disediakan (Unit)													
7.01.03.2.03.00 01 - Penyelenggaraa n Lembaga Kemasyarakata n				520.335.000		720.000.000		725.000.000		728.000.000		730.000.000		
Terselenggarany a Lembaga Kemasyarakata n	Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Diselenggarak an (Lembaga Kemasyarakata n)	5	3	520.335.000	3	720.000.000	3	725.000.000	3	728.000.000	3	730.000.000		
7.01.03.2.03.00 02 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakata n				90.000.000		92.000.000		94.000.000		96.000.000		98.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	0	234	90.000.000	234	92.000.000	234	94.000.000	234	96.000.000	234	98.000.000		
7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan				0		0		45.000.000		46.000.000		47.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	1	45.000.000	1	46.000.000	1	47.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.03.00 04 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembanga n Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	2	2	200.000.000	2	250.000.000	2	300.000.000	2	350.000.000	2	400.000.000		
7.01.03.2.03.00 05 - Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				60.000.000		66.000.000		68.000.000		70.000.000		72.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi	2	1	60.000.000	1	66.000.000	1	68.000.000	1	70.000.000	1	72.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tepat Guna (Laporan)													
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100	10.307.904.370	100	8.549.400.000	100	8.776.400.000	100	8.946.000.000	100	9.116.000.000	7.01.0.0 0.0.00.0 6.0001 - KELURA HAN LAMAR U	
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaa n masyarakat di wilayah kecamatan (%)	16,5 5	18		20		22		24		26			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				977.000.000		456.000.000		481.000.000		506.000.000		531.000.000		
Terselenggarany a kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	119	81	977.000.000	35	456.000.000	35	481.000.000	35	506.000.000	35	531.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	36	36		36		36		36		36			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakat an)													
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	1		1		1		1		1			
7.01.03.2.02.00 01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				40.000.000		42.000.000		44.000.000		46.000.000		48.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	36	36	40.000.000	36	42.000.000	36	44.000.000	36	46.000.000	36	48.000.000		
7.01.03.2.02.00 02 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				877.000.000		350.000.000		370.000.000		390.000.000		410.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	119	81	877.000.000	35	350.000.000	35	370.000.000	35	390.000.000	35	410.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terbangun (Unit)													
7.01.03.2.02.00 03 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				50.000.000		52.000.000		53.000.000		54.000.000		55.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	1	50.000.000	1	52.000.000	1	53.000.000	1	54.000.000	1	55.000.000		
7.01.03.2.02.00 04 - Evaluasi Kelurahan				10.000.000		12.000.000		14.000.000		16.000.000		18.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1	10.000.000	1	12.000.000	1	14.000.000	1	16.000.000	1	18.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Kecamatan				698.011.215		700.000.000		705.000.000		708.000.000		710.000.000		
Tercapainya keaktifan lembaga kemasyarakata n di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyaraka tan yang Diselenggarak an (Lembaga Kemasyaraka tan)	3	34	698.011.215	34	700.000.000	34	705.000.000	34	708.000.000	34	710.000.000		
7.01.03.2.03.00 01 - Penyelenggaraa n Lembaga Kemasyarakata n				698.011.215		700.000.000		705.000.000		708.000.000		710.000.000		
Terselenggarany a Lembaga Kemasyarakata n	Jumlah Lembaga Kemasyaraka tan yang	3	34	698.011.215	34	700.000.000	34	705.000.000	34	708.000.000	34	710.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Diselenggarak an (Lembaga Kemasyarakat an)													
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakat an di Kecamatan (%)	100	100	10.307.904.370	100	8.549.400.000	100	8.776.400.000	100	8.946.000.000	100	9.116.000.000	7.01.0.0 0.0.00.0 6.0002 - KELURA HAN MANGG AR BARU	
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaa	16,5 5	18		20		22		24		26			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	n masyarakat di wilayah kecamatan (%)													
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.005.000.000		461.000.000		486.000.000		510.000.000		535.000.000		
Terselenggarany a kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakat an)	54	54	1.005.000.000	54	461.000.000	54	486.000.000	54	510.000.000	54	535.000.000		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)													
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	187	66		35		35		35		35			
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
7.01.03.2.02.00 01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah				45.000.000		47.000.000		49.000.000		50.000.000		52.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakat an)	54	54	45.000.000	54	47.000.000	54	49.000.000	54	50.000.000	54	52.000.000		
7.01.03.2.02.00 02 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				900.000.000		350.000.000		370.000.000		390.000.000		410.000.000		
Terbangunnya Sarana dan	Jumlah Sarana dan	187	66	900.000.000	35	350.000.000	35	370.000.000	35	390.000.000	35	410.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Prasarana Kelurahan	Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)													
7.01.03.2.02.00 03 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				50.000.000		52.000.000		53.000.000		54.000.000		55.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	1	50.000.000	1	52.000.000	1	53.000.000	1	54.000.000	1	55.000.000		
7.01.03.2.02.00 04 - Evaluasi Kelurahan				10.000.000		12.000.000		14.000.000		16.000.000		18.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1	10.000.000	1	12.000.000	1	14.000.000	1	16.000.000	1	18.000.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Kecamatan				1.038.990.155		1.040.000.000		1.045.000.000		1.048.000.000		1.050.000.000		
Tercapainya keaktifan lembaga kemasyarakata n di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Diselenggarak an (Lembaga Kemasyarakat an)	3	52	1.038.990.155	52	1.040.000.000	52	1.045.000.000	52	1.048.000.000	52	1.050.000.000		
7.01.03.2.03.00 01 - Penyelenggaraa n Lembaga				1.038.990.155		1.040.000.000		1.045.000.000		1.048.000.000		1.050.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kemasyarakata n														
Terselenggarany a Lembaga Kemasyarakata n	Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Diselenggarak an (Lembaga Kemasyarakat an)	3	52	1.038.990.155	52	1.040.000.000	52	1.045.000.000	52	1.048.000.000	52	1.050.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakat an di Kecamatan (%)	100	100	10.307.904.370	100	8.549.400.000	100	8.776.400.000	100	8.946.000.000	100	9.116.000.000	7.01.0.0 0.0.00.0 6.0003 - KELURA HAN TERITIP	
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada	16,5 5	18		20		22		24		26			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)													
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				813.000.000		461.000.000		486.000.000		510.000.000		535.000.000		
Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1	813.000.000	1	461.000.000	1	486.000.000	1	510.000.000	1	535.000.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	223	25		35		35		35		35			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	50		50		50		50		50			
7.01.03.2.02.00 01 -				45.000.000		47.000.000		49.000.000		50.000.000		52.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	50	45.000.000	50	47.000.000	50	49.000.000	50	50.000.000	50	52.000.000		
7.01.03.2.02.00 02 - Pembangunan				708.000.000		350.000.000		370.000.000		390.000.000		410.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sarana dan Prasarana Kelurahan														
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	223	25	708.000.000	35	350.000.000	35	370.000.000	35	390.000.000	35	410.000.000		
7.01.03.2.02.00 03 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				50.000.000		52.000.000		53.000.000		54.000.000		55.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	1	50.000.000	1	52.000.000	1	53.000.000	1	54.000.000	1	55.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02.00 04 - Evaluasi Kelurahan				10.000.000		12.000.000		14.000.000		16.000.000		18.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1	10.000.000	1	12.000.000	1	14.000.000	1	16.000.000	1	18.000.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Kecamatan				933.378.000		933.400.000		938.400.000		940.000.000		942.000.000		
Tercapainya keaktifan lembaga kemasyarakata n di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Diselenggarak an (Lembaga Kemasyarakata n)	3	48	933.378.000	48	933.400.000	48	938.400.000	48	940.000.000	48	942.000.000		
7.01.03.2.03.00 01 -				933.378.000		933.400.000		938.400.000		940.000.000		942.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyelenggaraa n Lembaga Kemasyarakata n														
Terselenggarany a Lembaga Kemasyarakata n	Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Diselenggarak an (Lembaga Kemasyarakata n)	3	48	933.378.000	48	933.400.000	48	938.400.000	48	940.000.000	48	942.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakata n di Kecamatan (%)	100	100	10.307.904.370	100	8.549.400.000	100	8.776.400.000	100	8.946.000.000	100	9.116.000.000	7.01.0.0 0.0.00.0 6.0004 - KELURA HAN MANGG AR	
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan	16,5 5	18		20		22		24		26			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaa n masyarakat di wilayah kecamatan (%)													
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.290.000.000		681.000.000		706.000.000		731.000.000		756.000.000		
Terselenggarany a kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1	1.290.000.000	1	681.000.000	1	706.000.000	1	731.000.000	1	756.000.000		
	Jumlah Lembaga Kemasyaraka tan yang Berpartisipasi	102	132		132		132		132		132			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakat an)													
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	229	44		44		44		44		44			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02.00 01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				65.000.000		67.000.000		69.000.000		71.000.000		73.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakat an)	102	132	65.000.000	132	67.000.000	132	69.000.000	132	71.000.000	132	73.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02.00 02 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.165.000.000		550.000.000		570.000.000		590.000.000		610.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	229	44	1.165.000.000	44	550.000.000	44	570.000.000	44	590.000.000	44	610.000.000		
7.01.03.2.02.00 03 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				50.000.000		52.000.000		53.000.000		54.000.000		55.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaa n Masyarakat	0	1	50.000.000	1	52.000.000	1	53.000.000	1	54.000.000	1	55.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	di Kelurahan (Pokmas / Ormas)													
7.01.03.2.02.00 04 - Evaluasi Kelurahan				10.000.000		12.000.000		14.000.000		16.000.000		18.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1	10.000.000	1	12.000.000	1	14.000.000	1	16.000.000	1	18.000.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Kecamatan				2.457.190.000		2.460.000.000		2.465.000.000		2.468.000.000		2.470.000.000		
Tercapainya keaktifan lembaga kemasyarakata n di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Diselenggarak an (Lembaga	102	130	2.457.190.000	130	2.460.000.000	130	2.465.000.000	130	2.468.000.000	130	2.470.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kemasyarakat an)													
7.01.03.2.03.00 01 - Penyelenggaraa n Lembaga Kemasyarakata n				2.457.190.000		2.460.000.000		2.465.000.000		2.468.000.000		2.470.000.000		
Terselenggarany a Lembaga Kemasyarakata n	Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Diselenggarak an (Lembaga Kemasyarakata n)	102	130	2.457.190.000	130	2.460.000.000	130	2.465.000.000	130	2.468.000.000	130	2.470.000.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				1.161.189.120		1.180.000.000		1.198.000.000		1.216.000.000		1.234.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	1.161.189.120	100	1.180.000.000	100	1.198.000.000	100	1.216.000.000	100	1.234.000.000	7.01.0.0 0.0.00.0 6.0000 - KECAM ATAN BALIKP APAN TIMUR	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum				300.000.000		305.000.000		310.000.000		315.000.000		320.000.000		
Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraa n ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	12	16	300.000.000	14	305.000.000	14	310.000.000	14	315.000.000	14	320.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)													
7.01.04.2.01.00 01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				300.000.000		305.000.000		310.000.000		315.000.000		320.000.000		
Terlaksananya Sinergitas dengan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas	12	16	300.000.000	14	305.000.000	14	310.000.000	14	315.000.000	14	320.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)													
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				350.000.000		355.000.000		360.000.000		365.000.000		370.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	15	350.000.000	15	355.000.000	15	360.000.000	15	365.000.000	15	370.000.000		
7.01.04.2.02.00 01 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat				350.000.000		355.000.000		360.000.000		365.000.000		370.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
Terlaksananya Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-	Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	0	15	350.000.000	15	355.000.000	15	360.000.000	15	365.000.000	15	370.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)													
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	1.161.189.120	100	1.180.000.000	100	1.198.000.000	100	1.216.000.000	100	1.234.000.000	7.01.0.0 0.0.00.0 6.0001 - KELURAHAN LAMAR U	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum				80.000.000		82.000.000		83.000.000		84.000.000		85.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraa n ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	15	80.000.000	15	82.000.000	15	83.000.000	15	84.000.000	15	85.000.000		
7.01.04.2.01.00 01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara				80.000.000		82.000.000		83.000.000		84.000.000		85.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	15	80.000.000	15	82.000.000	15	83.000.000	15	84.000.000	15	85.000.000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi				47.797.280		48.000.000		49.000.000		50.000.000		51.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
Terwujudnya kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	0	14	47.797.280	14	48.000.000	14	49.000.000	14	50.000.000	14	51.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indonesia (Laporan)													
7.01.04.2.02.00 01 - Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				47.797.280		48.000.000		49.000.000		50.000.000		51.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	47.797.280	14	48.000.000	14	49.000.000	14	50.000.000	14	51.000.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban	100	100	1.161.189.120	100	1.180.000.000	100	1.198.000.000	100	1.216.000.000	100	1.234.000.000	7.01.0.0 0.0.00.0 6.0002 - KELURA HAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Umum di Kecamatan	Umum yang ditindaklanjuti (%)												MANGGAR BARU	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				80.000.000		82.000.000		83.000.000		84.000.000		85.000.000		
Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	0	15	80.000.000	15	82.000.000	15	83.000.000	15	84.000.000	15	85.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kecamatan (Laporan)													
7.01.04.2.01.00 01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				80.000.000		82.000.000		83.000.000		84.000.000		85.000.000		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	0	15	80.000.000	15	82.000.000	15	83.000.000	15	84.000.000	15	85.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)													
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				47.797.280		48.000.000		49.000.000		50.000.000		51.000.000		
Terwujudnya kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan	12	14	47.797.280	14	48.000.000	14	49.000.000	14	50.000.000	14	51.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)													
7.01.04.2.02.00 01 - Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-				47.797.280		48.000.000		49.000.000		50.000.000		51.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
Terlaksananya Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	12	14	47.797.280	14	48.000.000	14	49.000.000	14	50.000.000	14	51.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indonesia (Laporan)													
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	1.161.189.120	100	1.180.000.000	100	1.198.000.000	100	1.216.000.000	100	1.234.000.000	7.01.0.0 0.0.00.0 6.0003 - KELURAHAN TERITIP	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum				80.000.000		82.000.000		83.000.000		84.000.000		85.000.000		
Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan	0	15	80.000.000	15	82.000.000	15	83.000.000	15	84.000.000	15	85.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
n ketentraman dan ketertiban umum	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)													
7.01.04.2.01.00 01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di				80.000.000		82.000.000		83.000.000		84.000.000		85.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Wilayah Kecamatan														
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	15	80.000.000	15	82.000.000	15	83.000.000	15	84.000.000	15	85.000.000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan				47.797.280		48.000.000		49.000.000		50.000.000		51.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peraturan Kepala Daerah														
Terwujudnya kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	14	47.797.280	14	48.000.000	14	49.000.000	14	50.000.000	14	51.000.000		
7.01.04.2.02.00 01 - Koordinasi/Sine				47.797.280		48.000.000		49.000.000		50.000.000		51.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
rgi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
Terlaksananya Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	0	14	47.797.280	14	48.000.000	14	49.000.000	14	50.000.000	14	51.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)													
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	1.161.189.120	100	1.180.000.000	100	1.198.000.000	100	1.216.000.000	100	1.234.000.000	7.01.0.0 0.0.00.0 6.0004 - KELURAHAN MANGGAR	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman				80.000.000		82.000.000		83.000.000		84.000.000		85.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dan Ketertiban Umum														
Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraa n ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	15	80.000.000	15	82.000.000	15	83.000.000	15	84.000.000	15	85.000.000		
7.01.04.2.01.00 01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik				80.000.000		82.000.000		83.000.000		84.000.000		85.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	15	80.000.000	15	82.000.000	15	83.000.000	15	84.000.000	15	85.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				47.797.280		48.000.000		49.000.000		50.000.000		51.000.000		
Terwujudnya kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara	12	14	47.797.280	14	48.000.000	14	49.000.000	14	50.000.000	14	51.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Republik Indonesia (Laporan)													
7.01.04.2.02.00 01 - Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				47.797.280		48.000.000		49.000.000		50.000.000		51.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	14	47.797.280	14	48.000.000	14	49.000.000	14	50.000.000	14	51.000.000		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN				290.000.000		303.000.000		312.000.000		321.000.000		330.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMERINTAHAN UMUM														
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	290.000.000	100	303.000.000	100	312.000.000	100	321.000.000	100	330.000.000	7.01.0.0 0.0.00.0 6.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
7.01.05.2.01 - Penyelenggara n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				150.000.000		155.000.000		160.000.000		165.000.000		170.000.000		
Terwujudnya kecamatan yang mengamalkan Pancasila,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan	0	200	150.000.000	300	155.000.000	300	160.000.000	300	165.000.000	300	170.000.000		

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
7.01.05.2.01.00 01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika				150.000.000		155.000.000		160.000.000		165.000.000		170.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	0	200	150.000.000	300	155.000.000	300	160.000.000	300	165.000.000	300	170.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan	100	100	290.000.000	100	303.000.000	100	312.000.000	100	321.000.000	100	330.000.000	7.01.0.0 0.0.00.0 6.0001 - KELURA HAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)												LAMAR U	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				35.000.000		37.000.000		38.000.000		39.000.000		40.000.000		
Terwujudnya kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	0	100	35.000.000	100	37.000.000	100	38.000.000	100	39.000.000	100	40.000.000		

[illegible]



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01.00 01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan				35.000.000		37.000.000		38.000.000		39.000.000		40.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	0	100	35.000.000	100	37.000.000	100	38.000.000	100	39.000.000	100	40.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	290.000.000	100	303.000.000	100	312.000.000	100	321.000.000	100	330.000.000	7.01.0.0 0.0.00.0 6.0002 - KELURA HAN MANGG AR BARU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				35.000.000		37.000.000		38.000.000		39.000.000		40.000.000		
Terwujudnya kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhineka Tunggal Ika serta mempertahank	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara	0	100	35.000.000	100	37.000.000	100	38.000.000	100	39.000.000	100	40.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
an dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
7.01.05.2.01.00 01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan				35.000.000		37.000.000		38.000.000		39.000.000		40.000.000		

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	0	100	35.000.000	100	37.000.000	100	38.000.000	100	39.000.000	100	40.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	290.000.000	100	303.000.000	100	312.000.000	100	321.000.000	100	330.000.000	7.01.0.0 0.0.00.0 6.0003 - KELURA HAN TERITIP	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai				35.000.000		37.000.000		38.000.000		39.000.000		40.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penugasan Kepala Daerah														
Terwujudnya kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhineka Tunggal Ika serta mempertahank an dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	0	100	35.000.000	100	37.000.000	100	38.000.000	100	39.000.000	100	40.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Republik Indonesia	Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
7.01.05.2.01.00 01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar				35.000.000		37.000.000		38.000.000		39.000.000		40.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	0	100	35.000.000	100	37.000.000	100	38.000.000	100	39.000.000	100	40.000.000		

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indonesia (Orang)													
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	290.000.000	100	303.000.000	100	312.000.000	100	321.000.000	100	330.000.000	7.01.0.0 0.0.00.0 6.0004 - KELURA HAN MANGG AR	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai				35.000.000		37.000.000		38.000.000		39.000.000		40.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penugasan Kepala Daerah														
Terwujudnya kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhineka Tunggal Ika serta mempertahank an dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	0	120	35.000.000	130	37.000.000	130	38.000.000	130	39.000.000	130	40.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Republik Indonesia	Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
7.01.05.2.01.00 01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar				35.000.000		37.000.000		38.000.000		39.000.000		40.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	0	120	35.000.000	130	37.000.000	130	38.000.000	130	39.000.000	130	40.000.000		



[illegible]

[illegible]

4.3 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sebagai upaya memastikan keterpaduan antara perencanaan kewilayahan di tingkat kecamatan dengan arah pembangunan daerah, disusun daftar subkegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut memuat subkegiatan terpilih yang memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian target RPJMD. Untuk mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, Kecamatan Balikpapan Timur dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3.  
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR</b>				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
2.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
3.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
4.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
<b>7.01.0.00.0.00.06.0001 - KELURAHAN LAMARU</b>				
5.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
6.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
7.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
8.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
<b>7.01.0.00.0.00.06.0002 - KELURAHAN MANGGAR BARU</b>				
9.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
10.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
11.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
12.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
<b>7.01.0.00.0.00.06.0003 - KELURAHAN TERITIP</b>				

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
13.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
14.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
15.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
16.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
<b>7.01.0.00.0.00.06.0004 - KELURAHAN MANGGAR</b>				
17.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
		Pelayanan Publik di Kecamatan		
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
18.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
19.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
20.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

#### 4.4 Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Perangkat Daerah

Pada periode perencanaan sebelumnya, yaitu Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2021–2026, Kecamatan Balikpapan Timur belum menetapkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) secara formal sebagai alat ukur pencapaian kinerja daerah pada tingkat kecamatan. Hal ini dikarenakan belum adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur kewajiban penyusunan IKD pada level kecamatan, serta keterbatasan sistem pengukuran kinerja yang tersedia saat itu.

Namun, seiring dengan perkembangan regulasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, termasuk pada level kecamatan, maka pada periode perencanaan tahun 2026–2030, Kecamatan Balikpapan Timur telah menetapkan dan mengintegrasikan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, terukur, dan berorientasi hasil (result-based management).

Penyusunan IKD ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan perlunya indikator kinerja yang terukur dalam setiap dokumen perencanaan pembangunan.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2026–2030 dirumuskan untuk:

1. Mengukur capaian tujuan dan sasaran pembangunan kecamatan, sebagaimana tertuang dalam visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah.
2. Menjadi alat evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan secara lebih sistematis dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, khususnya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara efektif dan efisien.
4. Mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan secara keseluruhan, melalui kontribusi nyata pembangunan di tingkat kecamatan.

Dalam dokumen Renstra ini, IKD disusun berdasarkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound), dan dijabarkan secara langsung dalam tabel sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Timur. Adapun IKD yang ditetapkan mencerminkan hasil-hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada kecamatan, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2026–2030.

Dengan ditetapkannya IKD dalam Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2026–2030, diharapkan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan dapat lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat, serta mendukung pencapaian visi Kota Balikpapan sebagai kota yang berkelanjutan, cerdas, dan berdaya saing.

Tabel 4.4.  
Indikator Kinerja Daerah Kecamatan Balikpapan Timur

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR</b>												
<b>I</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI</b>											
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	Indeks yang menggambarkan hasil kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan eksternal yang diberikan oleh kecamatan	diperoleh dari kegiatan survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi berdasarkan (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)	89,46	89,55	89,64	89,73	89,82	89,91	90	Indikator Tujuan
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur melalui evaluasi	diperoleh dari evaluasi internal yang dilakukan oleh inspektorat daerah (berdasarkan Peraturan Menteri	68,26	69,33	69,5	70	71	72	73	Indikator Sasaran



NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan seberapa baik perangkat daerah tersebut dalam merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya.	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)								
3	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	%	Persentase yang menggambarkan hasil evaluasi perkembangan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan kelurahan di Kecamatan	(Jumlah Kelurahan yang mendapatkan kategori 'Cepat Berkembang" / Jumlah Kelurahan di Wilayah Administratif Kecamatan x 100%) (Penetapan kategori sesuai Permendagri 81 tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan)	100	75	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran



NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
			mediasi, penanganan langsung maupun pemberian solusi administratif									
6	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	%	persentase yang menggambarkan kegiatan sosialisasi, pelatihan, seminar, diskusi dan pembinaan terkait nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, serta cinta tanah air yang bertujuan untuk sarana kegiatan pembinaan yang meningkatkan solidaritas, gotong royong, pencegahan konflik sosial ketahanan keluarga dan ketahanan lingkungan masyarakat yang difasilitasi	(Jumlah masyarakat yang difasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial / Jumlah masyarakat yang ditargetkan untuk pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial) x 100%	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Program
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Indeks	Indeks yang menggambarkan hasil kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat (Pegawai) terhadap kualitas layanan internal yang diberikan oleh kecamatan	diperoleh dari kegiatan survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Sekretariat Kecamatan berdasarkan (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan	79,8	80	81	82	83	84	85	Indikator Program

[illegible]

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Kecamatan sesuai dengan Permendagri No. 18 Tahun 2018) x 100%								

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan merupakan tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan 2025–2029. Penyusunan IKU ini memperhatikan keselarasan terhadap RPJMD Kota Balikpapan dan prioritas pembangunan kewilayahan Kecamatan Balikpapan Timur. Tabel berikut menyajikan daftar IKU Kecamatan Balikpapan Timur beserta target kinerjanya, yang menjadi acuan dalam pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Tabel 4. 5  
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Timur

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	7.01 - KECAMATAN										
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	positif	Indeks	89,46	89,55	89,64	89,73	89,82	89,91	90	
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	positif	Nilai	68,26	69,33	69,5	70	71	72	73	
4.	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	positif	%	100	75	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	positif	Indeks	79,8	80	81	82	83	84	85	
8.	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	positif	%	16,55	16,65	18	20	22	24	26	
10.	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan Kecamatan Balikpapan Timur untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Kecamatan Balikpapan Timur dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Balikpapan yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kota Balikpapan. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Balikpapan Timur ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Balikpapan Timur.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Balikpapan Timur serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Balikpapan. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Balikpapan Timur merupakan solusi paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Kecamatan Balikpapan Timur dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Balikpapan Timur.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Kecamatan Balikpapan Timur yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Balikpapan Timur harus ditingkatkan. Hasil Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Balikpapan Timur. Laporan Kinerja (LKj) itu akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Timur di masa yang akan datang. Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Balikpapan Timur ini.



## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan Kecamatan Balikpapan Timur untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Kecamatan Balikpapan Timur dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Balikpapan yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kota Balikpapan. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Balikpapan Timur ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Balikpapan Timur.

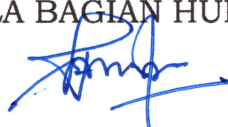
Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Balikpapan Timur serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Balikpapan. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Balikpapan Timur merupakan solusi paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Kecamatan Balikpapan Timur dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Balikpapan Timur.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Kecamatan Balikpapan Timur yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Balikpapan Timur harus ditingkatkan. Hasil Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Balikpapan Timur. Laporan Kinerja (LKj) itu akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Timur di masa yang akan datang. Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Balikpapan Timur ini.

WALI KOTA BALIKPAPAN,  
Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN